Danantara Indonesia

PELINDO
INDONESIA MARITIME GATEWAY

SUSTAINING LEADERSHIP, CREATING LONG-TERM VALUE

Laporan Tahunan **2025** Annual Report

PELINDO

INDONESIA MARITIME GATEWAY

Laporan Tahunan **2025** Annual Report

Danantara Indonesia
PELINDO
INDONESIA MARITIME GATEWAY
SUSTAINING LEADERSHIP, CREATING LONG-TERM VALUE
Laporan Tahunan 2025 Annual Report

Tema dan Arti Tema
Themes and Their Meaning

SUSTAINING LEADERSHIP, CREATING LONG-TERM VALUE

MEMPERKUAT KEPEMIMPINAN UNTUK MENCIPTAKAN NILAI JANGKA PANJANG

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) selanjutnya disebut Perseroan atau Pelindo, senantiasa berkomitmen untuk memperkuat peran kepemimpinan transformasional di seluruh lini organisasi. Kepemimpinan yang dimaksud tidak hanya terbatas pada aspek manajerial, tetapi juga mencakup kemampuan strategis dalam mengarahkan integrasi operasional pelabuhan, meningkatkan efisiensi layanan logistik, serta memperkuat daya saing pelabuhan Indonesia di tingkat regional maupun global. Penguatan kepemimpinan menjadi kunci utama untuk memastikan harmonisasi proses bisnis, standardisasi layanan, serta optimalisasi aset pelabuhan di seluruh Indonesia. Hal ini sejalan dengan upaya Perseroan dalam membangun ekosistem logistik maritim yang terintegrasi, efisien, dan berkelanjutan, sehingga mampu memberikan nilai tambah jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.

Sejalan dengan transformasi kepemimpinan tersebut, pada tahun 2025 Pelindo menunjukkan pencapaian yang positif dan berkelanjutan. Perseroan menunjukkan penguatan fundamental bisnis yang didukung optimalisasi pendapatan jasa kepelabuhanan, efisiensi biaya, serta pengelolaan investasi yang lebih terarah. Pelindo juga terus mempercepat pengembangan infrastruktur strategis melalui peningkatan kapasitas terminal, modernisasi peralatan, dan penguatan konektivitas hinterland. Selain itu, Perseroan juga memperkuat implementasi ESG melalui inisiatif pelabuhan hijau, efisiensi energi, serta peningkatan keselamatan dan kesejahteraan pekerja, sebagai bagian dari komitmen pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan.

PT Pelabuhan Indonesia (Persero), hereinafter referred to as the Company or Pelindo, is committed to strengthening the role of transformational leadership across all levels of the organization. This leadership covers not only managerial aspects but also strategic capabilities in directing port operational integration, improving logistics service efficiencies, and strengthening the competitiveness of Indonesian ports at the regional and global levels. Strengthening leadership is key to ensuring business process harmonization, service standardization, and optimization of port assets throughout Indonesia. This aligns with the Company's efforts to develop an integrated, efficient, and sustainable maritime logistics ecosystem, and by so doing delivering long-term added value for all stakeholders.

In line with this leadership transformation, Pelindo demonstrated positive and sustainable achievements by 2025. The Company demonstrated strengthened business fundamentals, supported by optimizing port service revenues, cost efficiencies, and more targeted investment management. Pelindo also continued to accelerate strategic infrastructure development by increasing terminal capacity, modernizing equipment, and strengthening hinterland connectivity. The Company is also strengthening ESG implementation through its green port initiatives, energy efficiency initiatives, and improvements in worker safety and well-being, as part of its commitment to long-term sustainable growth.

Kesinambungan Tema
Theme Continuity

2024

Beyond the Port: Integrity Rooted, Resilience Delivered
Melampaui Pelabuhan: Berakar pada Integritas, Menghadirkan Ketahanan

PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) atau Pelindo tidak hanya berfokus pada layanan pelabuhan semata, melainkan melangkah lebih jauh membangun konektivitas, menggerakkan logistik nasional, dan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini menunjukkan peran Perseroan dalam meluaskan peran, membentuk ekosistem yang lebih kuat dan berkelanjutan, bahkan hingga ke wilayah yang sebelumnya tidak terjangkau.

Setiap langkah maju Pelindo berlandaskan pada nilai-nilai kejujuran, kepercayaan, dan tanggung jawab. Berakar pada integritas yang merupakan fondasi yang kokoh, Perseroan memastikan bahwa dalam setiap keputusan, layanan, dan inovasi, Pelindo tetap teguh menjaga kepercayaan masyarakat, mitra, dan bangsa.

Pelindo juga berkomitmen untuk membangun organisasi yang tangguh dalam menghadapi tantangan global, krisis ekonomi, hingga perubahan iklim. Dengan fondasi integritas, Pelindo siap menciptakan sistem pelabuhan dan logistik yang adaptif, inovatif, dan mampu bertahan menghadapi segala ketidakpastian masa depan. Ke depan, Pelindo akan terus berkembang, melayani lebih luas, menjaga prinsip, dan memperkuat ketahanan untuk masa depan yang lebih gemilang.

PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), or Pelindo, focuses not only on port services but also goes beyond building connectivity, driving national logistics, and driving Indonesia's economic growth. This demonstrates the Company's expanding role, building a stronger and more sustainable ecosystem, even reaching previously unreachable areas.

Every step forward for Pelindo is based on the values of honesty, trust, and responsibility. Rooted in integrity, which is a solid foundation, the Company ensures that in every decision, service, and innovation, Pelindo remains steadfast in maintaining the trust of the community, partners, and the nation.

Pelindo is also committed to building a resilient organization in the face of global challenges, economic crises, and climate change. With a foundation of integrity, Pelindo is ready to create a port and logistics system that is adaptive, innovative, and resilient to future uncertainties. Moving forward, Pelindo will continue to grow, serve a wider audience, uphold its principles, and strengthen its resilience for a brighter future.

2023

Solid Performance For a Progressive Indonesian Maritime Growth
Kinerja Solid untuk Kemajuan Pertumbuhan Maritim Indonesia

PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) atau Pelindo menegaskan komitmennya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, konektivitas antar pulau, serta keberlanjutan sektor maritim Indonesia, sehingga memberikan kontribusi positif yang berkelanjutan bagi kemajuan bangsa. Dukungan teknologi terbaru seperti Terminal Operating System (TOS), Pelindo Terminal Operating System Multipurpose (PTOS-M), dan Phinnisi memberikan dampak signifikan terhadap industri pelayaran dan logistik, dengan pengurangan biaya dan peningkatan efisiensi waktu yang signifikan. Selain itu, pada tahun 2023 Perseroan memasuki fase *business expansion and partnership* yaitu, akan berfokus pada peningkatan pengembangan bisnis melalui strategic partnership, kolaborasi dengan pelayaran domestik dan global untuk peningkatan konektivitas laut serta pengembangan konektivitas dan ekosistem logistik melalui kerja sama dengan pelaku industri logistik darat. Dengan berbagai strategi dan pengelolaan yang tersentralisasi, pada tahun 2023 Perseroan mencatat pertumbuhan yang solid dalam kinerja operasionalnya.

PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) or Pelindo emphasized its commitment to supporting economic growth, inter-island connectivity and the sustainability of Indonesia's maritime sector, thereby providing a sustainable positive contribution to the nation's progress. The latest technology support such as the Terminal Operating System (TOS), Pelindo Terminal Operating System Multipurpose (PTOS-M), and Phinnisi has had a significant impact on the shipping and logistics industry, with significant reductions in costs and increased time efficiencies. In 2023 the Company will enter the business expansion and partnership phase, where it will focus on increasing business development through strategic partnerships, collaborations with domestic and global shipping to increase sea connectivity, as well as develop connectivity and logistics ecosystems through collaborations with land logistics industry businesses. By following its strategies and centralized management, in 2023 the Company recorded solid growth in its operational performance.

2022

Solid Integration Towards a National Maritime Economic Gateway

Integrasi Kuat Menuju Gerbang Ekonomi Maritim Nasional

Pasca penggabungan, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo memiliki visi untuk menjadi pemimpin ekosistem maritim yang terintegrasi dan berkelas dunia, dan misi untuk mewujudkan jaringan ekosistem maritim nasional melalui peningkatan konektivitas jaringan dan integrasi pelayanan guna mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal tersebut diwujudkan dengan menyediakan jasa kepelabuhan dan maritim yang handal dan terintegrasi dengan kawasan industri untuk mendukung jaringan logistik Indonesia dan global dengan memaksimalkan manfaat ekonomi Selat Malaka. Tahun 2022 merupakan fase business alignment and integration yaitu Perseroan akan berfokus pada penyelarasan bisnis paska integrasi melalui standardisasi dan integrasi operasional dan komersial untuk peningkatan kualitas pelayanan, melakukan investasi terintegrasi untuk pengembangan bisnis serta reorganisasi perusahaan dan pengembangan budaya terintegrasi.

Following the merger, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) or Pelindo has a vision to become an integrated and world- class maritime ecosystem leader, and a mission to create a national maritime ecosystem network by increasing network connectivity and service integration to support Indonesia's economic growth. This will be realized by providing reliable and integrated ports and maritime services with industrial estates to support the Indonesian and global logistics network by maximizing the economic bene ts of the Malacca Straits. 2022 was the business alignment and integration phase, where the Company focused on post-integration business alignment through operational and commercial standardization and integration to improve service quality, integrated investments for business development, and reorganized the Company to develop an integrated culture.

2021

United We Stand

Bersatu Kami Kuat

Inisiatif strategis pemerintah untuk mewujudkan jaringan koneksi nasional dan ekosistem logistik yang lebih kokoh diwujudkan melalui penggabungan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), dan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) ke dalam PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan selanjutnya menjadi PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Dengan penggabungan ini, diharapkan jaringan koneksi maritim, baik koneksi antara pelabuhan-pelabuhan dalam negeri maupun di luar negeri akan semakin meningkat. Melalui penggabungan ini, PT Pelabuhan Indonesia (Persero), selanjutnya disebut Pelindo, memiliki kendali strategis yang lebih baik dan dukungan faktor finansial yang kuat sehingga operasional bisnis Pelindo akan lebih terkoordinasi, efisien, efektif, dan memiliki standar tertentu yang nantinya akan memberikan dampak baik bagi masyarakat, terutama pengguna jasa.

Penggabungan keempat entitas usaha tersebut merupakan terobosan bisnis pelabuhan yang sebelumnya bersifat regional, kini bertransformasi menjadi skala nasional. Dengan membentuk 4 (empat) korporasi *subholding* setara BUMN yaitu, *Subholding* Pelindo Terminal Peti Kemas, *Subholding* Pelindo Multi Terminal, *Subholding* Pelindo Jasa Maritim, dan *Subholding* Pelindo Solusi Logistik. Maka skema bisnis akan lebih terfokus pada tiap-tiap kluster sehingga dapat meningkatkan kapasitas pelayanan Pelindo dan efisiensi usaha. Integrasi juga membuat kendali strategis yang lebih baik dalam perencanaan keseluruhan untuk jaringan, pengurangan biaya logistik, dan meningkatkan infrastruktur serta kapasitas. Entitas usaha yang sebelumnya bergerak secara mandiri kini telah bertransformasi menjadi Pelindo yang terintegrasi dan mampu mewujudkan jaringan ekosistem maritim nasional melalui peningkatan konektivitas jaringan dan integrasi pelayanan guna mendukung pertumbuhan ekonomi negara.

The government's strategic initiative to create a stronger national connection network and logistics ecosystem was realized through the merger of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), and PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) into PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) that subsequently became PT Pelabuhan Indonesia (Persero). With this merger, it is hoped that the maritime connection network between domestic and international ports will grow. Through this merger, PT Pelabuhan Indonesia (Persero), hereinafter referred to as Pelindo, will have better strategic control and strong nancial support so that Pelindo's business operations will be more coordinated, e cient, e ective, and standards that will have a good impact on the communities, especially service users.

The merger of the four business entities is a breakthrough in a port business that was previously regional in nature, to be transformed on a national scale. By establishing 4 (four) SOE-equivalent subholding corporations, Pelindo Terminal Petikemas Subholding, Pelindo Multi Terminal Subholding, Pelindo Jasa Maritim Subholding, and Subholding Pelindo Solusi Logistik Subholding. The business scheme will be more focused on clusters to increase Pelindo's service capacity and business efficiency. Integration will also provide better strategic control over overall planning for the network, reduce logistics costs, and improve the infrastructure and capacity. The previously independent business entities have been transformed into an integrated Pelindo to create a national maritime ecosystem network through increased network connectivity and service integration to support the country's economic growth now.

Daftar Isi
Table of Content

5 Tema dan Arti Tema
Themes and Their Meaning

6 Kesinambungan Tema
Theme Continuity

8 Daftar Isi
Table of Contents

10 Sekilas Tentang Perseroan
The Company at a Glance

12 Jejak Langkah
Milestone

16 Pelindo *Group* Pasca Penggabungan
Pelindo Group Post Merger

18 Empat Tahun Perjalanan Pelindo Pasca Penggabungan
Four Years of Pelindo's Post Merger Journey

32 Kilas Kinerja
Performance

30 Pencapaian Kinerja Penting Tahun 2025
Important Performance Achievements in 2025

34 Ikhtisar Data Keuangan Penting
Important Financial Data Overview

48 Informasi Saham
Stock Information

49 Informasi Obligasi, Sukuk, dan/atau Obligasi Konversi
Bonds, Sukuk and/or Convertible Bond Information

50 Informasi Sumber Pendanaan Lainnya
Information on Other Funding Sources

51 Peristiwa Penting
Important Events

52 Laporan Direksi dan Dewan Komisaris
Board of Directors and Board of Commissioners Reports

62 Laporan Direksi
Board of Directors Report

80 Laporan Dewan Komisaris
Board of Commissioners Report

96 Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2025 PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
Statement by the Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners concerning Responsibility for the 2025 Annual Report of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)

98 Profil Perusahaan
Company Profile

100 Identitas Perusahaan
Company Identity

101 Nama dan Alamat Kantor Wilayah dan Kantor Cabang
Name and Addresses of Regional Offices and Branch Offices

104 *Brand* Perusahaan
Company Brand

105 Riwayat Singkat Perusahaan
Brief History of The Company

107 Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan
Vision, Mission, and Corporate Culture

109 Kegiatan Usaha
Business Activities

115 Wilayah Operasional
Operating Areas

116 Daftar Keanggotaan Asosiasi
Association Membership

118 Struktur Organisasi
Organizational Structure

120 Profil Direksi
Board of Directors' Profiles

158 Profil Dewan Komisaris
Board of Commissioners' Profiles

182 Profil Pekerja
Employee Profiles

184 Komposisi Pemegang Saham
Shareholder Composition

185 Pemegang Saham Utama dan Pengendali
Majority and Controlling Shareholder

186 Daftar Entitas Anak, Perusahaan Asosiasi dan Perusahaan Ventura Bersama
List of Subholdings, Subsidiaries, Associated Companies and Joint Venture Companies

204 Struktur Grup Perusahaan
Company Group Structure

296 Kronologi Penerbitan Saham
Share Issuance Chronology

210 Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Efek Lainnya Saham
Issuance and/or Other Securities Listing Chronology

213 Informasi Penggunaan Jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik
Public Accountants (AP) and Public Accounting Firms (KAP) Services

214 Lembaga dan/atau Profesi Penunjang
Supporting Institutions and/or Professionals

216 Penghargaan dan Sertifikasi
Awards and Certification

218 Informasi yang Tersedia di *Website*
Information Available on the Website

231 Sumber Daya Manusia
Human Resources

232 Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia
Human Capital Management Strategy

234 Kebijakan dan Pelaksanaan Manajemen Sumber Daya Manusia
Human Capital Management Policy and Implementation

253 Sistem Informasi Sumber Daya Manusia
Human Capital Information Systems

257 Internalisasi Budaya
Internalization of Culture

261 Keterbukaan Informasi Kepada Pekerja
Disclosure of Information to Employees

262 Struktur Pengelola Sumber Daya Manusia
Human Capital Management Structure

262 Rencana Kerja Sumber Daya Manusia 2026
Human Resources Work Plan 2026

268 Teknologi Informasi
Information Technology

270 Teknologi Informasi
Information Technology

271 *Master Plan* Teknologi Informasi
Information Technology Master Plan

272 Pengembangan Teknologi Informasi
Information Technology Development

277 Infrastruktur Teknologi Informasi
Information Technology Infrastructure

278 Tata Kelola Teknologi Informasi
Information Technology Governance

286 Struktur Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi
Information Technology and Communication Management Structure

289 Rencana Kerja Teknologi Informasi 2026
Information Technology Work Plan for 2026

290 Analisis dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perseroan
Management Discussion and Analysis of The Company's Performance

292 Tinjauan Perekonomian
Economic Review

301 Tinjauan Keuangan
Financial Review

377 Tinjauan Operasional
Operational Review

490 Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance

492 Pencapaian dalam Penerapan Tata Kelola Perusahaan
Achievements in Corporate Governance

493 Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan
Basis of Corporate Governance Implementation

494 Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan
Structure and Mechanism of Corporate Governance

771 Perkara Hukum
Legal Cases

809 Sanksi Administratif yang Dikenakan kepada Perusahaan, Anggota Dewan Komisaris dan Direksi oleh Otoritas Pasar Modal dan Otoritas Lainnya
Administrative Sanctions Imposed on the Company, Members of Board of Commissioners and Board of Directors by Capital Market Authorities and Other Authorities

809 Akses Informasi dan Data Perusahaan
Access to Company Information and Data

815 Kode Etik
Code of Conduct

821 Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja
Performance-Based Long-Term Compensation Policy

822 Kebijakan Pengungkapan Informasi Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi serta Pelaksanaannya
Policy on Information Disclosure of Board of Commissioners and Board of Directors Share Ownership and the Implementation

822 *Whistleblowing System*
Whistleblowing System

833 Program Anti Korupsi
Anti-Corruption Program

843 Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
State Official Wealth Report (LHKPN)

843 *Insider Trading*
Insider Trading

845 Tata Kelola Terintegrasi
Integrated Governance

874 Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
Implementation of Public Company Governance Guidelines

860 *Good Corporate Governance Assessment*
Good Corporate Governance Assessment

869 Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)
Social and Environmental Responsibility Program (CSR)

873 Kinerja Program TJSL
CSR Program Performance

880 Realisasi Program TJSL Tahun 2025
Realization of CSR Program in 2025

894 Program Kolaborasi BUMN
SOE Collaboration Program

900 TJSL Pemenuhan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/03/2023
CSR Compliance with The Minister of SOE Regulation Number Per-01/MBU/03/2023

901 Informasi TJSL Sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.04/2021
TJSL Information According to The Financial Services Authority Circular Letter Number 16/SEOJK.04/2021

902 Lampiran
Appendix

904 Referensi Silang SEOJK No. 16 / SEOJK.04/2021: Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik
Cross-Reference No. 16/SEOJK.04/2021: Format and Completing the Annual Report of Issuers or Public Companies

928 Laporan Keuangan
Financial statement

Sekilas Tentang Perseroan
The Company at a Glance

Total Aset | Total Assets
Rp **126,90**
triliun | trillion

Pemegang Saham | Shareholders
Republik Indonesia
Republic of Indonesia
100%

Produk dan Jasa Utama:
- Layanan Petikemas
- Layanan Non Petikemas
- *Logistic & Hinterland*
- *Marine & Equipment*

Main Products and Services
- *Container Services*
- *Non-Container Services*
- *Logistic & Hinterland*
- *Marine & Equipment*

PELINDO
INDONESIA MARITIME GATEWAY

Segmen Usaha
Business Segment
Jasa Kepelabuhan dan Logistik
Port and Logistics Services

- 4 *Subholding*
- 6 Entitas Anak
- 24 Entitas Cucu
- 9 Entitas Cicit
- 11 Perusahaan Asosiasi
- 1 Perusahan Ventura Bersama

- *4 Subholding*
- *6 Subsidiaries*
- *24 Sub-subsidiaries*
- *9 Subsidiaries of Subsidiaries*
- *10 Associated Company*
- *2 Joint Venture*

Danantara Indonesia
PELINDO

Jejak Langkah
Milestones

1960

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) didirikan dengan status Perusahaan Negara (PN) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1960 tentang pengelolaan pelabuhan umum yang dilakukan oleh Badan Pengusahaan Pelabuhan (BPP).

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) was established with the status of a State Enterprise (PN) in accordance to the 1960 Government Regulation No. 19 concerning the management of ports by the Port Management Agency (BPP).

1964-1969

Kegiatan operasional pelabuhan dikoordinasikan oleh lembaga Pemerintah yang disebut Otoritas Pelabuhan, meskipun PN masih menangani aspek komersial.

The port's operational activities were coordinated by a government agency called the Port Authority, though PN still handled its commercial aspects.

1969-1983

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18/1969, BPP dikelola masing-masing pelabuhan. BPP menggantikan PN setelah Otoritas Pelabuhan dibubarkan.

According to the Government Regulation No. 18/1969, The BPP managed each seaport. BPP replaced PN after the Port Authority was dissolved.

2014

Pada tahun 2014, IPC melakukan banyak investasi pada Entitas Anak, yang nilainya sebesar Rp1,43 triliun, meningkat 33,64% dibandingkan tahun 2013 yang sebesar Rp1,07 triliun. Selain itu, IPC juga menanamkan investasi pada pengembangan sumber daya manusia, khususnya di bidang pendidikan yang dilakukan di dalam dan luar negeri. Dalam rangka terus meningkatkan kinerja, IPC juga telah melakukan sejumlah studi dan riset terkait dengan industri maritim. Di antaranya dilakukan bersama World Bank tentang *"Implementation of reducing logistic cost in Indonesia & Port Development priority projects and financing strategy"*. Untuk mewujudkan pelayanan satu atap yang memuaskan bagi seluruh pelanggan, IPC melalui Direktorat Komersial dan Pengembangan Usaha bekerja sama dengan Direktorat Operasi dan Cabang Pelabuhan Tanjung Priok sebagai *pilot project*, telah menyediakan tempat pelayanan dengan suasana yang nyaman, terbuka, fleksibel, dan modern.

In 2014, the Company invested Rp1.43 trillion in subsidiaries, increased 33.64% compared to to Rp1.07 trillion in 2013. In addition, the Company also invested in human resources development, particularly in domestic and overseas education. In order to perform better, the Company has also conducted several studies and researches related to maritime industry. Among them are jointly carried out with the World Bank on "Implementation of Reducing Logistic Cost in Indonesia & Port Development Priority Projects and Financing Strategy". To establish one stop service to meet customers' demand, the Company provides an open, convenient, flexible, and modern service area through cooperation between its Directorate of Commercial/Business Development and Directorate of Operations and Branches of Tanjung Priok Port.addition, the Company also managed to achieve 93.316 GCG score and 532.5 KPKU score.

2015

Di tahun ini, IPC berhasil menerbitkan obligasi di pasar modal internasional atau *global bond* sebesar USD1,6 miliar. Selain itu, IPC juga semakin menorehkan prestasi di jaringan komunitas pelabuhan dunia dengan menjalin kerja sama dalam rangka *sister port* dengan Port of Townsville Ltd, Australia dan Shenzhen Port Authority. Dari sisi operasional, IPC telah melakukan banyak pemanfaatan dan pembaharuan di seluruh aspek fasilitas kepelabuhan eksisting seperti penerapan sistem OPUS dalam pengelolaan terminal peti kemas di Tanjung Priok, Panjang, Pontianak dan Palembang. Salah satu Prestasi lainnya yang diukir oleh IPC di tahun 2015 adalah diresmikannya IPC Corporate University oleh Presiden RI Bapak Joko Widodo. IPC Corporate University merupakan bagian dari program transformasi strategis dan visioner dalam rangka menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan *soft infrastructure*. Melalui IPC Corporate University, IPC berharap untuk dapat mencetak generasi gemilang yang berdaya saing tinggi dengan kompetensi teknis kepelabuhanan dan logistik, manajemen dan kepemimpinan yang dapat diandalkan.

In 2015, IPC successfully issued bonds in the international capital markets or the global bond amounted to USD1.6 billion. In addition, IPC also increasingly created some achievements in the world with a network port community and worked together as the sister port of the Port of Townsville Ltd, Australia and Shenzhen Port Authority. From the operational point of view, the Company did a lot of utilization and renewal in all aspects of port existing facilities such as the implementation of the OPUS system in the management of container terminal in Tanjung Priok, Panjang, Pontianak and Palembang. Another achievement made by IPC in 2015 was the launch of IPC Corporate University by the President of Republic of Indonesia Joko Widodo. IPC Corporate University is part of a strategic and visionary transformation program in order to prepare things related to soft infrastructure. Through IPC Corporate University, the Company expects to be able to produce a glorious generation of highly competitive with the technical competence of port and logistics, management and reliable leadership.

1985

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1983 juncto PP No. 5 tanggal 5 Februari 1985, Perum Pelabuhan dilebur dan dibagi menjadi 4 wilayah operasi, dengan nama Perum Pelabuhan I sampai IV. Keempat Perum itu merupakan BUMN yang berada di bawah pembinaan Departemen Perhubungan Republik Indonesia.

Based on the Government Regulation No. 15/1983 juncto PP No. 5 dated February 5, 1985, Perum Pelabuhan was merged and divided into four operational areas, under the names of Perum Pelabuhan I to IV. The four Companies later on became a State-Owned Enterprise under the supervision of Ministry of Transportation of Republic of Indonesia.

1992

Badan hukum Perum diubah menjadi Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57/1991, yang sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang mengakibatkan perubahan pada nama Perusahaan menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II, dan berada di bawah pembinaan Kementerian BUMN, sebagaimana diatur dalam Akta Notaris Nomor 3 tertanggal 1 Desember 1992.

The legal form of Perum was changed to Limited Liability Company (PT) based on the Government Regulation No. 57/1991, whose shares are fully owned by the Republic of Indonesia resulted in changes to the Company's name to Perseroan Company (Persero) of PT Pelabuhan Indonesia II, under the management of the Ministry of SOEs, as stipulated in Notarial deed No. 3 dated December 1, 1992. The port's operational activities were coordinated by a government agency called the Port Authority, though PN still handled its commercial aspects.

2013

IPC fokus kepada pengembangan langkah strategis perusahaan. Melanjutkan keberhasilan transformasi, IPC harus bergerak lebih cepat, efektif dan efisien dalam melayani kebutuhan jasa pelanggan atau pengguna jasa kepelabuhanan. Dengan optimisme dan keyakinan yang sungguh-sungguh, IPC siap melangkah mencapai terobosan-terobosan usaha di tahun-tahun selanjutnya serta menyiapkan diri menjadi yang terdepan, terbaik dan tersehat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia dan pelabuhan yang dipandang oleh dunia. Salah satu capaian terbesar di tahun ini adalah *Groundbreaking* Terminal New Priok oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono.

IPC focused on developing Company's strategic steps. Continuing the success of corporate transformation, the Company must move faster, effectively and efficiently in serving the needs of customer service or port service user. Through optimism and confidence, the Company was ready to step into business breakthroughs in the next years and prepare to be the leader, the best and healthiest in supporting Indonesia's economic growth and the respected port of the world. One of biggest achievements in this year was New Priok Terminal Groundbreaking by President of Republic of Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono.

2012

Pada tanggal 22 Februari 2012, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) meluncurkan *branding* identitas baru dan bertransformasi menjadi IPC, sebuah perusahaan penyedia jasa pelabuhan terkemuka di Indonesia, yang lebih efisien dan modern dalam berbagai aspek operasional, dalam rangka mencapai tujuan menjadi operator pelabuhan kelas dunia.

On February 22, 2012, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) launched its new identity and transformed into IPC, a leading port services company in Indonesia, to be more efficient and modern in every aspect of operations in order to achieve its goal to become a world- class port operator.

2016

Perusahaan memasuki fase pertama *Corporate Roadmap*, yaitu *Fit in Infrastructure* dengan fokus pada penataan tata kelola atau *governance* yang mencakup proses bisnis, SOP dan struktur; budaya perusahaan; restrukturisasi korporasi dan model bisnis; dan mendefinisikan kembali bisnis; yang disertai dengan penyelarasan *(fine-tuning)* dalam semua aspek.

Salah satu pencapaian terbesar Perusahaan di tahun 2016 adalah peresmian pengoperasian Terminal Peti Kemas Kalibaru Pelabuhan Utama Tanjung Priok/ New Priok Container Terminal 1 (NPCT1) oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo pada tanggal 13 September 2016. Selain itu Perusahaan juga berhasil mencapai skor GCG dengan nilai 93,316 dan skor KPKU dengan nilai 532,25.

The Company began the first phase of the Corporate Roadmap, The Fit in Infrastructure phase with the focus to governance management that covers business process, SOP and structure; corporate culture, corporate and business model restructuring; and business redefinition; along with fine tuning in all aspects.

One of the biggest achievements of the Company in 2016 was the inauguration of the Kalibaru Container Terminal at Tanjung Priok/PT New Priok Container Terminal 1 (PT NPCT1) by the President of the Republic of Indonesia Mr. Joko Widodo on September 13, 2016. In addition, the Company also managed to achieve 93.316 GCG score and 532.5 KPKU score.

2017

Pada Fase *Enhancement*, IPC menutup tahun 2017 dengan membukukan capaian kinerja keuangan dan operasional yang luar biasa. Hal ini disebabkan oleh karena untuk yang pertama kalinya dalam sejarah IPC didirikan, IPC mampu meraih pencapaian tertinggi yaitu untuk tahun buku 2017 pendapatan usaha dicatatkan sebesar Rp10,91 triliun dan laba bersih Rp2,21 triliun EBITDA Rp4,03 triliun, BOPO 70,15%. Sementara pada aspek operasional, realisasi trafik arus peti kemas tercapai 6,93 juta TEUs, arus barang terealisasi 57,09 juta ton, kunjungan kapal pencapaiannya 34.662 unit serta arus penumpang sebanyak 612.680 orang.

IPC memberikan jasa layanan yang diberi nama "*Java South East Asia Express Services*/Java SEA *Express Services*" atau disingkat "JAX *Services*", dengan rute pelabuhan Tanjung Priok ke *West Coast* (LA dan Oakland) Amerika Serikat. Rute ini dilayani melalui perusahaan pelayaran CMA-CGM atau *Compagnie Maritime d'Affrètement-Compagnie Gènèrale Maritime* yang juga membuka akses langsung ke Eropa. Kehadiran kapal kontainer berkapasitas 10.000 TEUs di Pelabuhan Tanjung Priok itu merupakan kapal terbesar yang pernah sandar di pelabuhan tersebut.

In Enhancement Phase, IPC closed the year 2017 by posting outstanding financial and operational performance achievements. This is because for the first time in the history since IPC was established, IPC achieved the highest achievement for the fiscal year 2017. Revenue was recorded at Rp10.91 trillion and net profit was at Rp2.21 trillion, EBITDA was at Rp4.03 trillion, BOPO was at 70.15 percent. While operationally, the realization of container flow traffic reached 6.93 million TEUs, the flow of goods reached 57.09 million tons, ships visit reached 34,662 units and passengers were as much as 612,680 people.

IPC provides services under the Java South East Asia Express Services/ Java SEA Express Services, or abbreviated as "JAX Services", connecting Tanjung Priok Port to US West Coast ports at LA and Oakland. This route is served through the CMACGM (Compagnie Maritime d'Affrétement-Compagnie Générale Maritime) shipping company, which also opens direct access to Europe. The presence of the first 10,000 TEUs container vessel at the Tanjung Priok Port Branch signals the milestone of the largest ship ever to dock at the port.

2018

Tahun 2018 merupakan tahun "*Establishment*" dengan fokus tahun ini adalah "*volume growth*", "*profitability growth*" dan "*holding establishment*".

2018 is the year of "Establishment" with the focus of "volume growth", "profitability growth" and "holding establishment".

2020

- Inisiatif Kerja Sama Awal (MoU) dengan 2 (dua) pelabuhan asing, yaitu Port of Rotterdam dan Port of Constantza, Romania.
- Akuisisi kepemilikan saham PT Multimedia Nusantara pada PT ILCS sebanyak 4.900.000 lembar saham atau setara dengan 49 persen porsi kepemilikan saham PT ILCS dengan nilai pengalihan sebesar Rp49.200.000.
- Mendukung pembentukan Holding Rumah Sakit BUMN atau Indonesia Health Corporation (IHC) melalui kepemilikan saham IPC di PT Pertamina Bina Medika IHC sebesar 2 persen.
- Progress pekerjaan konstruksi pembangunan fisik Terminal Kijing Tahap I per 31 Desember 2020 sebesar 80,01 persen, serta sedang dilaksanakan pembangunan Terminal Kalibaru Utara Tahap I dan Menara Maritim Indonesia.
- Initial Cooperation Initiatives (MoU) with two overseas ports, the Port of Rotterdam and Port of Constantza, Romania.
- Acquisition of shares by PT Multimedia Nusantara in PT ILCS amounting to 4,900,00 shares, equivalent to 49 percent of shares of PT ILCS with a transfer value amounting to Rp49,200,000.
- Supported the establishment of State-Owned Enterprise Hospital Holding, the Indonesia Health Corporation (IHC) by acquiring 2 percent of PT Pertamina Bina Medika IHC shares by IPC.
- Progress of physical construction work of Kijing Terminal Phase I as of December 31, 2020 reached 80.01 percent. At the same time, the construction of Kalibaru Utara Terminal Phase I, and Indonesia Maritime Tower was in progress.

2019

Capaian IPC di tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- 12 cabang pelabuhan telah memiliki sistem operasi berbasis digital yang setara dengan tingkat kebutuhan masing-masing cabang pelabuhan.
- IPC memperkenalkan *Single Truck Indentity Database* (TID) yang merupakan basis data truk yang hilir mudik di pelabuhan IPC. Tanjung Priok sebagai *pilot project* dan akan diimplementasikan secara penuh di cabang pelabuhan lainnya pada tahun 2020.
- IPC berhasil membangun kerjasama *sisterport* dengan 11 pelabuhan yaitu Port of Ningbo-China, Port of Guangzhou – China, Port of Shenzen-China, Port of Baku-Azerbaijan, Port of Towncille-Australia, Port of Lazaro Cardenas – Mexico, Port of Hamad-Qatar, Port of Djibouti – Afrika Timur, Port of Sabah-Malaysia dan Port of Los Angeles – Amerika.
- Pertengahan tahun 2019, lembaga pemeringkat independen Standard & Poor's meningkatkan peringkat IPC menjadi BBB dari peringkat sebelumnya BBB- dengan *outlook stable* (prosepek *stable*) yang menunjukan bahwa tren kinerja positif perusahaan.
- Penilaian KPKU dan skor GCG menunjukan tren peningkatan selama 4 tahun terakhir. Untuk *score* KPKU pada tahun 2019 IPC berhasil mencapai 616,75 dengan predikat *Emerging Industry Leader*. Sementara dari aspek GCG tahun 2019 kembali mencatat peningkatan signifikan dan mencapai skor 98,30 dengan kategori Sangat Baik.

IPC's achievements in 2019 are as follows:

- 12 Port Branches already have digital-based operating systems that are to the level of needs of each port branch.
- IPC introduced Single Truck Identity Database (TID), which is a database of trucks going back and forth at the ports of IPC. Tanjung Priok as a pilot project and will be fully implemented in other port branches in 2020.
- IPC succeeded in establishing sister port cooperation with 11 ports, namely Port of Ningbo-China, Port of Guangzhou-China, Port of Shenzhen-China, Port of Baku- Azerbaijan, Port of Townsville - Australia, Port of Lazaro Cardenas - Mexico, Port of Hamad-Qatar, Port of Djibouti - East Africa, Port of Sabah-Malaysia and Port of Los Angeles - America.
- In mid-2019, the independent rating agency Standard & Poor's upgraded IPC rating to BBB from the previous rating of BBB- with a stable outlook indicating a positive performance trend in the Company.
- KPKU assessment and GCG scores show an increasing trend over the past 4 years. For 2019 KPKU score, IPC reached 616.75 with the title of Emerging Industry Leader. While 2019 GCG aspect was recorded a significant increase once more and reached a score of 98.30 with the category of Very Good.

2021

Pada tanggal 1 Oktober 2021, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) digabungkan ke dalam PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dan berganti nama menjadi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau disingkat Pelindo.

On October 1, 2021, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) and PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) were merged into PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) with a name change to PT Pelabuhan Indonesia (Persero), abbreviated as Pelindo.

Pelindo *Group* Pasca Penggabungan

Pelindo Group Post Merger

Penggabungan Badan Usaha Milik Negara dalam bidang Kepelabuhanan yaitu PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) ke dalam PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang berlaku efektif terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2021, telah dilanjutkan dengan berbagai langkah tindak lanjut sinergi dan konsolidasi pasca integrasi/ penggabungan yang terus dijalankan.

The merger of State-Owned Enterprises in the Port sector, including PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) into PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), which became effective on October 1, 2021, has been followed up with post-integration/merger consolidation that is ongoing.

5

Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan Industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri

Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan Industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri

Tujuan

Membangun fondasi industrialisasi yang bernilai tambah tinggi di dalam negeri, terintegrasi antar wilayah, dan berdaya saing global sehingga mampu menjadi pengungkit perekonomian regional dan nasional

Membangun fondasi industrialisasi yang bernilai tambah tinggi di dalam negeri, terintegrasi antar wilayah, dan berdaya saing global sehingga mampu menjadi pengungkit perekonomian regional dan nasional

Sasaran Utama Pembangunan Nasional 5 tahun 2029

Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas, dan Daya Saing Industri Pengolahan

Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas, dan Daya Saing Industri Pengolahan

- Rasio PDB Industri Pengolahan 21,90%

- Rasio PDB Industri Pengolahan 21,90%

Peningkatan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Peningkatan Intergrasi Ekonomi Domestik dan Global

- Biaya Logistik 12.50% dari PDB
- Pembentukan modal tetap bruto 29.9% dari PDB
- Peningkatan ekspor barang dan jasa 22.6% dari PDB

- Biaya Logistik 12.50% dari PDB
- Pembentukan modal tetap bruto 29.9% dari PDB
- Peningkatan ekspor barang dan jasa 22.6% dari PDB

Dalam rangka pencapaian sasaran Prioritas Nasional nomor 5, terdapat intervensi kebijakan oleh Pemerintah yakni optimalisasi *backbone* integrasi ekonomi dan perkuatan sistem logistik nasional

Dalam rangka pencapaian sasaran Prioritas Nasional nomor 5, terdapat intervensi kebijakan oleh Pemerintah yakni optimalisasi *backbone* integrasi ekonomi dan perkuatan sistem logistik nasional

1. Penguatan infrastruktur Konektivitas, layanan *backbone*, dan Sarana Penunjang Logistik

Penguatan infrastruktur Konektivitas, layanan *backbone*, dan Sarana Penunjang Logistik

2. Penguatan Integrasi dan Digitalisasi Layanan Logistik

Penguatan Integrasi dan Digitalisasi Layanan Logistik

3. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Penyedia Jasa Logistik

Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Penyedia Jasa Logistik

Dalam mencapai sasaran tersebut, terdapat beberapa indicator/target yang relevan dengan bisnis Pelindo

Biaya transportasi logistik terhadap PDB %7,56

Biaya transportasi logistik terhadap PDB %7,56

7,56%

Rata-rata waktu perputaran di Pelabuhan (port-stay) 1,2 hari

Rata-rata waktu perputaran di Pelabuhan (port-stay) 1,2 hari

1,2 Hari

Biaya transportasi logistik pada angkutan laut terhadap PDB %0,87

Biaya transportasi logistik pada angkutan laut terhadap PDB %0,87

0,87%

Jumlah Pelabuhan utama yang memenuhi standar 12 Lokasi

Jumlah Pelabuhan utama yang memenuhi standar 12 Lokasi

12 Lokasi

Kinerja Bongkar muat pada pelabuhan utama petikemas (BSH) 50 Box/Ship/Jam

Kinerja Bongkar muat pada pelabuhan utama petikemas (BSH) 50 Box/Ship/Jam

50 Box/ Ship/Jam

Empat Tahun Perjalanan Pelindo Pasca Penggabungan

Four Years of Pelindo's Post Merger Journey

Sejak penggabungan PT Pelabuhan Indonesia I, III, dan IV ke dalam PT Pelabuhan Indonesia II pada 1 Oktober 2021, Pelindo telah menapaki tiga tahun transformasi yang membawa dampak signifikan bagi ekosistem kepelabuhanan nasional. Melalui berbagai inisiatif strategis, Pelindo berhasil melakukan transformasi operasional di berbagai wilayah di Indonesia, memperkuat struktur keuangan, meningkatkan efisiensi layanan, serta memperluas kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan.

Perjalanan transformasi ini tercermin dalam berbagai pencapaian yang mengukuhkan Pelindo sebagai pengelola kepelabuhanan yang lebih efisien, inovatif, dan terintegrasi. Dengan sinergi yang semakin kuat, Pelindo terus berinovasi untuk mendukung konektivitas maritim serta pertumbuhan ekonomi nasional.

Since the merger of PT Pelabuhan Indonesia I, III, and IV into PT Pelabuhan Indonesia II on October 1, 2021, Pelindo has gone through three years of transformation that has had a significant impact on the national port ecosystem. Through its strategic initiatives, Pelindo has successfully carried out operational transformation in a number of regions in Indonesia, strengthened its financial structure, increased service efficiencies, and expanded cooperation with its stakeholders.

This transformation journey can be seen In the achievements that have established Pelindo as a more efficient, innovative, and integrated port manager. With an increasingly strong synergy, Pelindo continues to innovate to support maritime connectivity and national economic growth.

Kaleidoskop 2025: Terimakasih atas dedikasi dan kerja keras Insan Pelindo
Kaleidoscope 2025: Thank you for the dedication and hard work of Pelindo employees

FEBRUARI 2025 FEBRUARY

28 Februari 2025 | February 28, 2025:

Melayani Kapal *Cruise Anthem of The Seas* di Pelabuhan Benoa dengan LOA 348 m dan 4500 penumpang

Serving the Anthem of the Seas cruise ship at Benoa Port with a LOA of 348 m and a capacity of 4,500 passengers

MARET 2025 MARCH

21 Maret 2025 | March 21, 2025:

Pelindo raih 2 penghargaan: Transformasi Organisasi Perusahaan Terbaik dan *The Best* CEO *Driving Execution* pada BUMN *Track* Anugerah BUMN

Pelindo receives two awards: Best Corporate Organizational Transformation and Best CEO Driving Execution at the BUMN Track Award BUMN

Kaleidoskop 2025: Terimakasih atas dedikasi dan kerja keras Insan Pelindo
Kaleidoscope 2025: Thank you for the dedication and hard work of Pelindo employees

APRIL 2025 APRIL

13 April 2025 | April 13, 2025:

Kapal *Cruise Ovation of The Seas* di Pelabuhan Benoa dengan LOA 348 m dan 4500 penumpang

Serving the Ovation of the Seas cruise ship at Benoa Port with a LOA of 348 m and a capacity of 4,500 passengers

APRIL 2025 APRIL

17-18 April 2025 | April 17-18, 2025:

Penanganan kemacetan di Tanjung Priok

Traffic management at Tanjung Priok

MEI 2025 MAY

21 Mei 2025 | May 21, 2025:

Go Live 102 customer care

Go Live 102 customer care

MEI 2025 MAY

22 Mei 2025 | May 22, 2025:

Groundbreaking pembangunan Bali Benoa Marina di BMTH, Pelabuhan Benoa

Groundbreaking for the construction of Bali Benoa Marina at BMTH, Benoa Port

26 Mei 2025 | May 26, 2025:

1st *Indonesia Maritime Week* 2025

First Indonesia Maritime Week 2025

7 Juli 2025 | July 7, 2025:

Pembukaan kembali alur pelayaran Pulau Baai

Reopening of the Pulau Baai shipping lane

Kaleidoskop 2025: Terimakasih atas dedikasi dan kerja keras Insan Pelindo

Kaleidoscope 2025: Thank you for the dedication and hard work of Pelindo employees

JULI 2025 JULY

31 Juli 2025 | July 31, 2025:

Groundbreaking pembangunan terminal penumpang Pelabuhan Ambon

Groundbreaking for the construction of the Ambon Port passenger terminal

AGUSTUS 2025 AUGUST

1 Agustus 2025 | August 1, 2025:

Melayani Kapal roro raksasa Mv. BYD Zhengzhoo (Kap.7000 unit mobil) di IKT Priok

Serving the giant roll-on-roll (roll-off) vessel Mv. BYD Zhengzhoo (capacity 7,000 vehicles) at IKT Priok

AGUSTUS 2025 AUGUST

8 Agustus 2025 | August 8, 2025:

Dimulainya Pembangunan New Priok Eastern Access

Starting construction of the New Priok Eastern Access

AGUSTUS 2025 AUGUST

15 Agustus 2025 | August 15, 2025:

Penandatanganan MoU antara BPS dengan Pelindo untuk meningkatkan kualitas data statistik jasa kepelabuhanan

Signing an MoU between BPS and Pelindo to improve the quality of port services statistical data

SEPTEMBER 2025 SEPTEMBER

12 September 2025 | September 12, 2025:

Pelindo kembali masuk dalam Fortune Indonesia 100 (peringkat 4 kategori di sektor infrastruktur)

Pelindo re-enters the Fortune Indonesia 100 (ranked 4th in the infrastructure sector)

OKTOBER 2025 OCTOBER

13 Oktober 2025 | October 13, 2025:

Pengoperasian uji coba perdana bongkar di Terminal Batang

Initial trial unloading operation at Batang Terminal

Kaleidoskop 2025: Terimakasih atas dedikasi dan kerja keras Insan Pelindo

Kaleidoscope 2025: Thank you for the dedication and hard work of Pelindo employees

OKTOBER 2025 OCTOBER

21 Oktober 2025 | October 21, 2025:

Pelindo raih 5 penghargaan pada ICCS *Summit* 2025 diantaranya: Juara 2 *Community Involvement and Development* (CID) Lingkungan dan Juara 2 *Community Involvement and Development* (CID) Kesehatan

Pelindo receives 5 awards at the 2025 ICCS Summit, including: 2nd place in the Community Involvement and Development (CID) Environment category and 2nd place in the Community Involvement and Development (CID) Health category.

NOVEMBER 2025 NOVEMBER

10 November 2025 | November 10, 2025:

Pelindo meraih penghargaan *Oustanding Maritime Connectivity* pada Indonesia Kita Awards

Pelindo receives the Outstanding Maritime Connectivity award at the Indonesia Kita Awards.

NOVEMBER 2025 NOVEMBER

12 November 2025 | November 12, 2025:

Pelindo meraih penghargaan *Leadership A- Advancing* ESG *Transparancy Leadership* pada Indonesia ESG *Leadership* 2025

Pelindo receives the Leadership A - Advancing ESG Transparency Leadership award at the Indonesia ESG Leadership 2025 Awards.

NOVEMBER 2025 NOVEMBER

12 November 2025 | November 12, 2025:

Pelindo meraih penghargaan GRC *Awards* 2025 pada *Business News Indonesia*

Pelindo receives the GRC Awards 2025 at Business News Indonesia.

NOVEMBER 2025 NOVEMBER

28 November 2025 | November 28, 2025:

Pembukaan alur -6.5 mLWS Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu

Opening of the -6.5 mLWS channel at Pulau Baai Port, Bengkulu

DESEMBER 2025 DECEMBER

16 Desember 2025 | December 16, 2025:

Quatrick, Pelindo raih penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Pusat

Quatrick and Pelindo receives the Public Information Transparency Award from the Central Information Commission

DESEMBER 2025 DECEMBER

12 Desember | December 12, 2025:

Pelindo raih penghargaan *The Best Industry Marketing Champion 2025 for the Infrastructure, Utilities, & Energy sector* dari Markplus

Pelindo receives the Best Industry Marketing Champion 2025 award for the Infrastructure, Utilities, & Energy sector from Markplus

JULI 2025 JULY

7 Juli 2025 | July 7, 2025:

Pembukaan kembali alur pelayaran Pulau Baai

Reopening of the Pulau Baai shipping lane

Hingga tahun 2025, berbagai capaian strategis berhasil diraih oleh Pelindo, menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan efisiensi logistik, dan memperkuat daya saing Indonesia di kancah global. Berikut merupakan highlight pencapaian Pelindo hingga tahun 2025.

In 2025, Pelindo achieved strategic milestones, affirming the company's commitment to supporting national economic growth, improving logistics efficiency, and strengthening Indonesia's competitiveness on the global stage. The following highlights Pelindo's achievements in 2025.

Capaian Kinerja Pelindo *Group*
Pelindo Group Performance Achievements

Integrasi layanan Pelindo Group Integration of Pelindo Group services	• Pengadaan bersama : konsolidasi pengadaan kategori BBM, TAD, *security*, mendatangkan efisiensi sebesar Rp131,03 Miliar • *Shared service center* : keuangan, pengadaan, dan SDM • Penyelesaian *single* ERP di Pelindo Group • Joint procurement: consolidation of procurement in the fuel, TAD, and security categories, resulting in efficiencies of Rp131.03 billion, summarized by Ms. Farah. • Shared service center: finance, procurement, and HR • Completion of a single ERP system across Pelindo Group
Transformasi model bisnis Business model transformation	• Pemurnian bisnis : penyelesaian 68 Aksi Korporasi s.d. tahun 2025 • Optimalisasi model bisnis • Restrukturisasi organisasi dan tata kelola Perusahaan • Business refinement: completion of 68 corporate actions. 2025 • Business model optimization • Organizational restructuring and corporate governance
Pengembangan layanan kepelabuhanan Port service development	• Penambahan 37 rute baru pelayaran • *Key Account Management* (KAM) terintegrasi • *Additional Marine Service* • *Strategic partnership* • Addition of 37 new shipping routes • Integrated Key Account Management (KAM) • Additional Marine Services • Strategic partnerships
Peningkatan *value* Perusahaan Increased company value	• Optimalisasi *financing cost* : pelunasan hutang Pelindo *Group* sebanyak 12,75 triliun rupiah pasca merger • Total efisiensi mencapai 2,64 triliun rupiah • Financing cost optimization: repayment of Pelindo Group's debt of Rp12.75 trillion post-merger • Total efficiency gains reached Rp2.64 trillion
Aksi Korporasi : Pemurnian Bisnis Corporate Actions: Business Purification	Hingga tahun 2025, sejumlah 68 Aksi Korporasi Pemurnian Bisnis telah dilaksanakan, di antaranya 13 Penggabungan/Pemekaran, 20 Transfer Bisnis/Operasi, 19 Pengambilalihan Usaha, 7 Restrukturisasi Keuangan/Bisnis, 6 Penambahan/Pelepasan Kepemilikan Saham, 2 Likuidasi, 1 Opsi Likuidasi dan Penambahan dan/atau pelepasan kepemilikan saham. In 2025, 68 Corporate Actions for Business Purification were implemented, including 13 mergers/expansions, 20 business/operational transfers, 19 business acquisitions, 7 financial/business restructurings, 6 shareholding additions/disposals, 2 liquidations, 1 liquidation option, and shareholding additions and/or dispossessions.
Perjanjian Konsesi Concession Agreements	Hingga akhir tahun 2025 telah ditandantangani 14 *Addendum* Perjanjian Konsesi By the end of 2025, 14 Addendums to Concession Agreements had been signed
Proyek Strategis Perusahaan Company Strategic Projects	a. Terminal Kalibaru : ekosistem yang terdiri dari terminal container dan non-container seluas 236 Ha di Tanjung Priok yang terintegrasi dengan akses jalan tol menuju Kawasan industri. b. MNP Tahap 1B dan 1C : Makassar New Port (MNP) merupakan container terminal di Makassar yang memiliki akses menuju Kawasan industri dan pembangunan telah selesai hingga tahap 1C dengan kapasitas 1,4 juta TEUs. c. BMTH : Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) merupakan ekosistem yang mengintegrasikan sektor pariwisata, pelabuhan, dan entertainment yang berlokasi di Benoa, Bali. d. Relokasi Jalan Nasional – Kijing : Relokasi Jalan Nasional pada Ruas Jalan Sei Duri-Batas Kota Mempawah sepanjang 5,62 km a. Kalibaru Terminal: an ecosystem consisting of a 236-hectare container and non-container terminal in Tanjung Priok, integrated with toll road access to the industrial area. b. MNP Phase 1B and 1C: Makassar New Port (MNP) is a container terminal in Makassar with access to the industrial area. Construction has been completed up to Phase 1C with a capacity of 1.4 million TEUs. c. BMTH: Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) is an ecosystem integrating the tourism, port, and entertainment sectors, located in Benoa, Bali. d. National Road Relocation – Kijing: Relocation of the National Road on the Sei Duri-Mempawah City Boundary section, 5.62 km long

Capaian Kinerja *Subholding* Terminal Petikemas (SPTP)
Container Terminal Subholding (SPTP) Performance Achievements

Standardisasi layanan terminal petikemas Standardization of Container Terminal Services	Sampai dengan tahun 2025, telah dilaksanakan Standarisasi layanan terminal petikemas di 21 terminal , meliputi T1 TPK New Makassar, T2 TPK New Makassar, T1 PMT-Belawan Domestik, TPK Sorong, TPK Nilam, TP 1 Zona 2, TP 2 Domestik, TPK Perawang, TPK Kupang, TPK Jayapura, TPK Pantoloan, TPK Tarakan, TPK Semarang, TPK Bitung, TP 1 Zona 3, TPK Balikpapan (KKT), TPK Ternate, TPK Banjarmasin, TPK Kendari, TPK Merauke dan TPK Bagendang - Bumiharjo In 2025, standardization of container terminal services was implemented at 21 terminals, including Terminal 1 New Makassar Terminal, Terminal 2 New Makassar Terminal, Terminal 1 PMT-Belawan Domestic Terminal, Terminal 1 Sorong Terminal, Terminal 1 Nilam Terminal, Terminal 1 Zone 2 Terminal, Terminal 2 of the Domestic Terminal, Terminal 1 Perawang Terminal, Terminal 1 Kupang Terminal, Terminal 1 Jayapura Terminal, Terminal 1 Pantoloan Terminal, Terminal 2 Tarakan Terminal, Terminal 1 Semarang Terminal, Terminal 1 Bitung Terminal, Terminal 1 e Zone 3 Terminal, Terminal 1 Balikpapan Terminal (KKT), Terminal 1 Ternate Terminal, Terminal 2 Banjarmasin Terminal, Terminal 1 Kendari Terminal, Terminal 1 Merauke Terminal, and Terminal 1 Bagendang-Bumiharjo Terminal.
Digitalisasi layanan terminal petikemas Digitalization of Container Terminal Services	Sampai dengan tahun 2025, telah dilaksanakan digitalisasi layanan terminal petikemas di 16 terminal, meliputi 009 Tanjung Priok, T1 TPK New Makassar, TPK Ambon, IPCTPK Pontianak, T2 T PK New Makassar, IPCTPK Palembang, T1 PMT-Belawan Domestik, IPCTPK Panjang, TPK Bitung, IPCTPK Teluk Bayur, IPCTPK Jambi, TPK Kupang, TPK Jayapura, TPK Sorong, TPK Pantoloan dan TPK Kendari By 2025, digitalization of container terminal services was implemented at 16 terminals, including Terminal 009 Tanjung Priok, Terminal 1 New Makassar Terminal, Terminal 1 Ambon Terminal, Terminal 1 Pontianak Terminal, Terminal 2 New Makassar Terminal, Terminal 1 Palembang Terminal, Terminal 1 Domestic PMT-Belawan, Panjang IPCTPK, Bitung TPK, Teluk Bayur IPCTPK, Jambi IPCTPK, Kupang TPK, Jayapura TPK, Sorong TPK, Pantoloan TPK, and Kendari TPK.
Transshipment Transshipment	Telah dilakukan Implementasi *Transhipment Domestic to International* di Tanjung Priok Domestic to International Transhipment was implemented in Tanjung Priok.
Implementasi elektrifikasi Electrification Implementation	Telah dilakukan elektrifikasi dan pengadaan alat elektrik sejumlah 17 Alat sehingga total Alat Elektrik s.d. tahun 2025 sejumlah 262 Alat di seluruh Terminal operasi Pelindo Group (termasuk Terminal Afiliasi JICT, NPCT 1, dan KOJA): **Alat Utama:** 13 Alat QCC = 1 Alat (1 Alat, TPK Ambon) RTG = 12 (4 Alat KOJA dan 8 Alat TPS) **Alat Pendukung:** 4 Alat *Side Loader* = 2 Alat (JICT) *Reach Stacker* = 2 Alat (JICT) Electrification and procurement of 17 electrical devices was carried out, bringing the total number of electrical devices to 1,000,000. In 2025, there were 262 units across all Pelindo Group operating terminals (including affiliated terminals JICT, NPCT 1, and KOJA): **Main Equipment:** 13 Equipment QCC = 1 unit (1 unit, TPK Ambon) RTG = 12 (4 units at KOJA and 8 units at TPS) **Supporting Equipment**: 4 Equipment Side Loaders = 2 units (JICT) Reach Stackers = 2 units (JICT)
Key Account Managament Key Account Management	Terdapat penambahan 37 rute baru pelayaran sampai dengan tahun 2025 There will be an addition of 37 new shipping routes by 2025

Capaian Kinerja *Subholding* Pelindo Multi Terminal (SPMT)
Performance Achievements of Pelindo Multi Terminal (SPMT) Subholding

Standardisasi layanan terminal non petikemas Standardization of non-container terminal services	Telah dilakukan standardisasi pada 63 terminal sampai dengan tahun 2025, meliputi Ambon, Bagendang, Balikpapan, Badas Reg3, Badas SPMT, Banten, Batulicin, Belawan, Bengkulu, Benoa, Bima, Bitung, Bumiharjo, Celukan Bawang, Cirebon, Dumai, Ende Ippi, Fakfak, Gorontalo, Gresik, Jamrud, Jambi, Kalianget, Kalimas, Kotabaru, Labuan Bajo, Lembar, Lhokseumawe, Makassar, Malahayati, Manado, Manokwari, Merauke, Mirah, Nilam, Nunukan, Palembang, Pangkal Balam, Panjang, Pantoloan, Pare-Pare (Garongkong), Pontianak-Kijing, Pulang Pisau, Samarinda, Sampit, Sibolga, Sorong, Sunda Kelapa, Tanjung Balai Asahan, Tanjung Balai Karimun, Tanjung Emas, Tanjung Intan, Tanjung Pandan, Tanjung Pinang, Tanjung Priok, Tanjung Tembaga, Tanjung Wangi, Tarakan, Teluk Bayur, Tembilahan, Tolitoli, Trisakti, Waingapu. Standardization was carried out at 63 terminals in 2025, including Ambon, Bagendang, Balikpapan, Badas Reg3, Badas SPMT, Banten, Batulicin, Belawan, Bengkulu, Benoa, Bima, Bitung, Bumiharjo, Celukan Bawang, Cirebon, Dumai, Ende Ippi, Fakfak, Gorontalo, Gresik, Jamrud, Jambi, Kalianget, Kalimas, Kotabaru, Labuan Bajo, Lembar, Lhokseumawe, Makassar, Malahayati, Manado, Manokwari, Merauke, Mirah, Nilam, Nunukan, Palembang, Pangkal Balam, Panjang, Pantoloan, Pare-Pare (Garongkong), Pontianak-Kijing, Pulang Pisau, Samarinda, Sampit, Sibolga, Sorong, Sunda Kelapa, Tanjung Balai Asahan, Tanjung Balai Karimun, Tanjung Emas, Tanjung Intan, Tanjung Pandan, Tanjung Pinang, Tanjung Priok, Tanjung Tembaga, Tanjung Wangi, Tarakan, Teluk Bayur, Tembilahan, Tolitoli, Trisakti, Waingapu.
Digitalisasi layanan terminal non petikemas dengan implementasi sistem PTOS *Multipurpose* Digitalization of non-container terminal services with the implementation of the Multipurpose PTOS system	Sistem PTOS Multipurpose telah diimplementasikan pada 63 terminal sampai dengan tahun 2025, meliputi Ambon, Badas, Bagendang, Balikpapan, Banten, Batulicin, Belawan, Bengkulu, Benoa, Bima, Bitung, Bumiharjo, Celukan Bawang, Cirebon, Dumai, Ende Ippi, Fak-Fak, Gorontalo, Gresik, Jambi, Jamrud, Kalianget, Kalimas, Kotabaru, Labuan Bajo, Lembar, Lhokseumawe, Makassar, Malahayati, Manado, Manokwari, Merauke, Nunukan, Palembang, Pangkal Balam, Panjang, Pantoloan, Pare-Pare (Garongkong), Pontianak-Kijing, Pulang Pisau, Samarinda, Sampit, Sibolga, Sorong, Sunda Kelapa, Tanjung Balai Karimun, Tanjung Emas, Tanjung Pandan, Tanjung Priok, Tanjung Wangi, Tarakan, Teluk Bayur, Tembilahan, Tanjung Balai Asahan, Tanjung Tembaga, Toli-Toli, Trisakti, Waingapu, Mirah, Nilam, Tanjung Pinang, Tanjung Intan The Multipurpose PTOS system was implemented in 63 terminals until 2025, including Ambon, Badas, Bagendang, Balikpapan, Banten, Batulicin, Belawan, Bengkulu, Benoa, Bima, Bitung, Bumiharjo, Celukan Bawang, Cirebon, Dumai, Ende Ippi, Fak-Fak, Gorontalo, Gresik, Jambi, Jamrud, Kalianget, Kalimas, Kotabaru, Labuan Bajo, Lembar, Lhokseumawe, Makassar, Malahayati, Manado, Manokwari, Merauke, Nunukan, Palembang, Pangkal Balam, Panjang, Pantoloan, Pare-Pare (Garongkong), Pontianak-Kijing, Pulang Pisau, Samarinda, Sampit, Sibolga, Sorong, Sunda Kelapa, Tanjung Balai Karimun, Tanjung Emas, Tanjung Pandan, Tanjung Priok, Tanjung Wangi, Tarakan, Teluk Bayur, Tembilahan, Tanjung Balai Asahan, Tanjung Tembaga, Toli-Toli, Trisakti, Waingapu, Mirah, Nilam, Tanjung Pinang, and Tanjung Intan.
Kerjasama pengoperasian pelabuhan TUKS TUKS port operational cooperation	Telah dilakukan pengoperasian TUKS Bukit Asam untuk kegiatan bongkar bungkil dan batu bara kebutuhan PLN di Teluk Bayur, TUKS Indonesia Bulk Terminal untuk komoditi BBM di Mekar Putih, serta Kerjasama dengan BUMN Karya untuk *handling* barang *project* IKN, TUKS Semen Indonesia di Gresik The Bukit Asam TUKS (Unloading Equipment) for PLN's coal and oil palm kernel shells in Teluk Bayur, the Indonesia Bulk Terminal TUKS for fuel commodities in Mekar Putih, and a collaboration with state-owned construction companies (BUMN Karya) for handling goods for the IKN project, and the Semen Indonesia TUKS in Gresik, have become operational.

Capaian Kinerja *Subholding* Pelindo Solusi Logistik (SPSL)
Performance Achievements of the Pelindo Solusi Logistik (SPSL) Subholding

Kerjasama dengan Pelaku Logistik BUMN & Swasta Collaboration with State-Owned and Private Logistics Players	Pelaku Logistik BUMN & Swasta yang beroperasi di wilayah Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan, Palembang, Pontianak, dan Pekanbaru serta wilayah kerja lain. State-owned and private logistics operators operating in Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan, Palembang, Pontianak, and Pekanbaru, as well as other working areas.
Kerjasama dengan Pelaku Logistik Global Collaboration with Global Logistics Players	• Kerjasama dengan PT MSC terkait kegiatan *customs trucking*, • Kerjasama dengan JTG Corporation. Co. Ltd terkait kegiatan *customs* impor ekspor, • Kerjasama dengan IPGS Corporation Pte.Ltd untuk kegiatan *Project Military Equipment*, • Kerjasama dengan PT Awot Global untuk kegiatan *clearance import*, *Scan Shipping* terkait kegiatan *delivery*, • Kerjasama dengan PT Mitra Utama Logistik terkait dengan multimoda *trucking*, LOLO, transportasi pada rute Belawan-Sei Mangkei Belawan • Collaboration with PT MSC regarding customs trucking activities, • Collaboration with JTG Corporation. Co. Ltd. for import and export customs activities, • Collaboration with IPGS Corporation Pte. Ltd. for Military Equipment Project activities, • Collaboration with PT Awot Global for import clearance activities, Scan Shipping for delivery activities, • Collaboration with PT Mitra Utama Logistik for multimodal trucking, LOLO, and transportation on the Belawan-Sei Mangkei Belawan route.
Optimalisasi Aset Asset Optimization	Hingga 2024, telah dilaksanakan optimalisasi pada 21 aset untuk Kawasan Pendukung Terminal, Depo, CCDC, Lapangan Penumpukan, serta Marina dan Entertainment Area. By 2024, optimization of 21 assets was implemented for Terminal Support Areas, Depots, CCDCs, Stacking Yards, Marinas and Entertainment Areas.
Standardisasi operasi logistik Standardization of Logistics Operations	Telah dilakukan standardisasi operasi logistik pada 7 lokasi sampai dengan tahun 2025, meliputi Ambon, Banjarmasin, CDC Banda, CDC Belawan, Common Area Tanjung Priok, Lapangan Makassar 100, Lapangan Pasoso. Logistics operations were standardized at seven locations by 2025, including Ambon, Banjarmasin, Banda CDC, Belawan CDC, Tanjung Priok Common Area, Makassar 100 Field, and Pasoso Field.
Implementasi Alat Pemindai Petikemas Implementation of Container Scanners	Pada bulan Desember 2025, telah diresmikan alat Pemindai Petikemas sebagai bagian dari upaya percepatan proses pemeriksaan barang serta dukungan terhadap implementasi sistem kepabeanan modern berbasis teknologi. Fasilitas ini dimanfaatkan secara bersama oleh Terminal 3 IPC Terminal Petikemas (TER3) dan Terminal Multi Alam Lestari (TMAL) di Pelabuhan Tanjung Priok, guna meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kelancaran arus logistik di kawasan pelabuhan. In December 2025, a Container Scanner was inaugurated as part of efforts to accelerate the goods inspection process and support the implementation of a modern, technology-based customs system. This facility is jointly utilized by Terminal 3 IPC Container Terminal (TER3) and Terminal Multi Alam Lestari (TMAL) at Tanjung Priok Port to improve efficiency, accuracy, and smooth logistics flow within the port area.
Kerja sama transportasi Multimoda Multimodal Transportation Cooperation	Belawan - Sei Mangkei - Belawan, Belawan - Kuala Tanjung – Belawan, Kuala Tanjung - Sei Mangkei - Kuala Tanjung, Belawan -Pematang Siantar - Belawan, Belawan - Padang Halaban - Belawan. Belawan - Sei Mangkei - Belawan, Belawan - Kuala Tanjung - Belawan, Kuala Tanjung - Sei Mangkei - Kuala Tanjung, Belawan - Pematang Siantar - Belawan, Belawan - Padang Halaban - Belawan.
Kerjasama bisnis pengelolaan logistic Kawasan industri Business Cooperation for Industrial Estate Logistics Management	Perjanjian kerjasama bisnis pengelolaan logistic Kawasan industri Jawa Timur (SPSL – SIER) dan Kawasan Industri Kijing. Business cooperation agreement for logistics management in the East Java Industrial Estate (SPSL - SIER) and the Kijing Industrial Estate.
kerja sama pengelolaan depo Depot Management Cooperation	Kerjasama pengelolaan depo di Dumai, Perawang dan Kuala Tanjung Collaboration on depot management in Dumai, Perawang, and Kuala Tanjung

Capaian Kinerja *Subholding* Pelindo Solusi Logistik (SPSL)
Performance Achievements of the Pelindo Solusi Logistik (SPSL) Subholding

Konektivitas antara Pelabuhan dan Kawasan Industri Connectivity between Ports and Industrial Estates	**Konektivitas antara Pelabuhan dan Kawasan Industri hingga tahun 2024:** **2022** 3 Kawasan Industri (KI) dengan 2 Pelabuhan: • Kawasan Industri Sei Mangkei, Kuala Tanjung, Medan dengan Pelabuhan Belawan dan Pelabuhan Kuala Tanjung **2023** 3 Kawasan Industri dengan 3 Pelabuhan: • Kawasan Industri Timur Jabodetabek dengan Pelabuhan Tanjung Priok • Kijing dengan Pelabuhan Kijing • Kawasan Industri Surabaya Rungkut dengan Pelabuhan Tanjung Perak. **2024** • 3 Kawasan industri dengan 2 Pelabuhan: • Kawasan Industri Kendal dengan Pelabuhan Tanjung Emas • Kawasan Industri Makassar dengan Makassar New Port • Kawasan Industri Pematang Siantar dengan Pelabuhan Kuala Tanjung **Connectivity between Ports and Industrial Estates until 2024:** **2022** 3 Industrial Estates (KI) with 2 Ports: • Sei Mangkei Industrial Estate, Kuala Tanjung, Medan with Belawan Port and Kuala Tanjung Port **2023** 3 Industrial Estates with 3 Ports: • Greater Jakarta East Industrial Estate with Tanjung Priok Port • Kijing with Kijing Port • Surabaya Rungkut Industrial Estate with Tanjung Perak Port **2024** 3 Industrial Estates with 2 Ports: • Kendal Industrial Estate with Tanjung Emas Port • Makassar Industrial Estate with Makassar New Port • Pematang Siantar Industrial Estate with Kuala Tanjung Port

Capaian Kinerja *Subholding* Pelindo Jasa Maritim (SPJM)
Performance Achievements of the Pelindo Maritime Services Subholding (SPJM)

Standardisasi pelayanan kapal Standardization of ship services	Telah dilakukan standardisasi pada 106 lokasi sampai dengan tahun 2025 meliputi Ambon, Ambon - TPK Ambon, Badas, Bagendang, Balikpapan, Balikpapan - TPK KKT, Balikpapan Kampung Baru, Banjarmasin, Banten Bojonegara, Batulicin, Belawan, Belawan Citra, Belawan IKD 1, Belawan IKT 2, Belawan IKT 3, Belawan Lama, Belawan Ujung Baru, Benoa, Biak, Bima, Bitung, Bitung - TPK Bitung, Bontang, Bumiharjo, Cabang Banten, Cabang Bengkulu, Cabang Cirebon, Cabang Jambi, Cabang Palembang, Cabang Pangkal Balam, Cabang Panjang, Cabang Pontianak, Cabang Sunda Kelapa, Cabang Tanjung Pandan, Cabang Tanjung Priok, Cabang Teluk Bayur, Celukan Bawang, Dumai, Ende, Fak-Fak, Gorontalo, Gresik, Gunung Sitoli, IPC TPK Pontianak, IPC TPK Teluk Bayur, Jayapura, Kalabahi, Kalianget, Kendari, Kendari - TPK KNP, Kotabaru, Kuala Tanjung, Kumai, Labuan Bajo, Lembar, Maumere, Makassar, Makassar - MNP, Makassar - TPK Makassar, Malahayati, Manado, Manokwari, Merauke, Nunukan, Pantoloan, Pare-Pare, Pekanbaru, Pontianak IKT, Pontianak Kijing, Pulang Pisau, Samarinda, Samarinda Palaran, Semarang, Semarang Nusantara, Semarang Samudera, Sibolga, Sorong, Sungai Pakning, Tanjung Balai Asahan, Tanjung Balai Karimun, Tanjung Emas - TPKS, Tanjung Intan, Tanjung Perak, Tanjung Perak - BJTI, Tanjung Perak - Jamrud, Tanjung Perak - Kalimas, Tanjung Perak - Nilam Mirah, Tanjung Perak - TPS, Tanjung Perak - TTL, Tanjung Pinang, Tanjung Priok IKT, Tanjung Priok JICT, Tanjung Priok Koja, Tanjung Priok NPCT1, Tanjung Priok PTP, Tanjung Redeb, Tanjung Tembaga, Tanjung Wangi, Tegal, Tembilahan, Tenau, Ternate, Toli-toli, Trisakti, Trisakti - TPKB, Waingapu Standardization was carried out at 106 locations in 2025 including Ambon, Ambon - TPK Ambon, Badas, Bagendang, Balikpapan, Balikpapan - TPK KKT, Balikpapan Kampung Baru, Banjarmasin, Banten Bojonegara, Batulicin, Belawan, Belawan Citra, Belawan IKD 1, Belawan IKT 2, Belawan IKT 3, Belawan Lama, Belawan Ujung Baru, Benoa, Biak, Bima, Bitung, Bitung - TPK Bitung, Bontang, Bumiharjo, Cabang Banten, Cabang Bengkulu, Cabang Cirebon, Cabang Jambi, Cabang Palembang, Cabang Pangkal Balam, Cabang Panjang, Cabang Pontianak, Cabang Sunda Kelapa, Cabang Tanjung Pandan, Cabang Tanjung Priok, Cabang Teluk Bayur, Celukan Bawang, Dumai, Ende, Fak-Fak, Gorontalo, Gresik, Gunung Sitoli, IPC TPK Pontianak, IPC TPK Teluk Bayur, Jayapura, Kalabahi, Kalianget, Kendari, Kendari - TPK KNP, Kotabaru, Kuala Tanjung, Kumai, Labuan Bajo, Lembar, Maumere, Makassar, Makassar - MNP, Makassar - TPK Makassar, Malahayati, Manado, Manokwari, Merauke, Nunukan, Pantoloan, Pare-Pare, Pekanbaru, Pontianak IKT, Pontianak Kijing, Pulang Pisau, Samarinda, Samarinda Palaran, Semarang, Semarang Nusantara, Semarang Samudera, Sibolga, Sorong, Sungai Pakning, Tanjung Balai Asahan, Tanjung Balai Karimun, Tanjung Emas - TPKS, Tanjung Intan, Tanjung Perak, Tanjung Perak - BJTI, Tanjung Perak - Jamrud, Tanjung Perak - Kalimas, Tanjung Perak - Nilam Mirah, Tanjung Perak - TPS, Tanjung Perak - TTL, Tanjung Pinang, Tanjung Priok IKT, Tanjung Priok JICT, Tanjung Priok Koja, Tanjung Priok NPCT1, Tanjung Priok PTP, Tanjung Redeb, Tanjung Tembaga, Tanjung Wangi, Tegal, Tembilahan, Tenau, Ternate, Toli-toli, Trisakti, Trisakti - TPKB, Waingapu
Digitalisasi layanan kapal dengan implementasi sistem Phinnisi Digitalization of ship services with the implementation of the Phinnisi system	Sistem Phinnisi telah diimplementasikan pada 87 lokasi sampai dengan tahun 2025, meliputi Amamapare, Ambon, Badas, Balikpapan, Banten, Batang, Batu Licin (Kawasan Bunati & Satui), Batulicin & Bunati, Bayah, Belawan, Bengkalis, Bengkulu, Benoa, Biak, Bima, Bitung, Bontang, Bula (Ambon), Celukan Bawang, Cirebon, Dumai, Ende, Fakfak, Gorontalo, Gunung Sitoli, Indominco, Jambi, Jayapura, Kalabahi, Kalianget, Kanci, Kendari, Kotabaru, Kuala Tanjung, Kumai, Labuan Bajo, Laiwui, Lembar, Lhokseumawe, Lubuktutung (Sangata), Luwuk Tangkian, Makassar, Malahayati, Manado, Manokwari, Maumere, Merauke, Nunukan, Nusantara Regas, Palembang, Panjang, Pantoloan, Pare Pare, Patimban, Pontianak, Pulang Pisau, Samarinda, Sambu & Nipah, Sampit, Sangkulirang, Sei Pakning & Perawang, Sibolga, Sorong, STS Musi, Sunda Kelapa, Tanah Grogot, Tanjung Balai Asahan, Tanjung Balai Karimun, Tanjung Emas, Tanjung Intan, Tanjung Pandan, Tanjung Perak & Gresik, Tanjung Pinang, Tanjung Priok, Tanjung Redeb, Tanjung Santan, Tanjung Tembaga, Tanjung Wangi, Tarakan, Tegal, Teluk Bayur, Tembilahan, Tenau Kupang, Ternate, Tolitoli, Trisakti / Banjarmasin, Waingapu. The Phinnisi system has been implemented in 87 locations by 2025, including Amamapare, Ambon, Badas, Balikpapan, Banten, Batang, Batu Licin (Kawasan Bunati & Satui), Batulicin & Bunati, Bayah, Belawan, Bengkalis, Bengkulu, Benoa, Biak, Bima, Bitung, Bontang, Bula (Ambon), Celukan Bawang, Cirebon, Dumai, Ende, Fakfak, Gorontalo, Gunung Sitoli, Indominco, Jambi, Jayapura, Kalabahi, Kalianget, Kanci, Kendari, Kotabaru, Kuala Tanjung, Kumai, Labuan Bajo, Laiwui, Lembar, Lhokseumawe, Lubuktutung (Sangata), Luwuk Tangkian, Makassar, Malahayati, Manado, Manokwari, Maumere, Merauke, Nunukan, Nusantara Regas, Palembang, Panjang, Pantoloan, Pare Pare, Patimban, Pontianak, Pulang Pisau, Samarinda, Sambu & Nipah, Sampit, Sangkulirang, Sei Pakning & Perawang, Sibolga, Sorong, STS Musi, Sunda Kelapa, Tanah Grogot, Tanjung Balai Asahan, Tanjung Balai Karimun, Tanjung Emas, Tanjung Intan, Tanjung Pandan, Tanjung Perak & Gresik, Tanjung Pinang, Tanjung Priok, Tanjung Redeb, Tanjung Santan, Tanjung Tembaga, Tanjung Wangi, Tarakan, Tegal, Teluk Bayur, Tembilahan, Tenau Kupang, Ternate, Tolitoli, Trisakti / Banjarmasin, Waingapu.

Capaian Kinerja *Subholding* Pelindo Jasa Maritim (SPJM)
Performance Achievements of the Pelindo Maritime Services Subholding (SPJM)

Pengembangan layanan marine di TUKS / Tersus Development of marine services at TUKS/Tersus	Hingga 2024 dilakukan pelayanan pada 6 TUKS yaitu TUKS KPC Sangata, TUKS Kideco, TUKS Tilamuta, TUKS Citic Bula, TUKS Tarempa, TUKS Sulfindo Adi Usaha In 2024, services provided to six TUKS: KPC Sangata, Kideco, Tilamuta, Citic Bula, Tarempa, and Sulfindo Adi Usaha.
Pengembangan layanan *Oil Spill Response* (OSR) Development of Oil Spill Response (OSR) services	Di Pelabuhan Belawan, Dumai, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Bagendang, Bumiharjo, Terminal Kijing dan Teluk Bayur At the ports of Belawan, Dumai, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Bagendang, Bumiharjo, Kijing Terminal, and Teluk Bayur.
Penyediaan listrik di area pelabuhan Provision of electricity in port areas	Hingga tahun 2024 telah dilakukan di Pelabuhan Tanjung Priok, Palembang, Panjang, Kijing, Pontianak, Tanjung Perak, Tanjung Emas, Bagendang, Belawan, Labuan Bajo In 2024, services provided at the ports of Tanjung Priok, Palembang, Panjang, Kijing, Pontianak, Tanjung Perak, Tanjung Emas, Bagendang, Belawan, and Labuan Bajo.
Penyediaan air bersih di area pelabuhan Provision of clean water in port areas	hingga tahun 2024 telah dilakukan di Pelabuhan Tanjung Priok, Sunda Kelapa, Kijing, Tanjung Emas, Teluk Lamong, Tanjung Perak, Banjarmasin, Belawan, Makassar In 2024, services provided at the ports of Tanjung Priok, Sunda Kelapa, Kijing, Tanjung Emas, Teluk Lamong, Tanjung Perak, Banjarmasin, Belawan, and Makassar.
Penyediaan galangan kapal (*shipyard*) Provision of shipyards	Galangan Rukindo Jakarta, PMS Surabaya dan Semarang, serta bekerja sama dengan Galangan Swasta di Batam, Belawan, Surabaya, Makassar, Bitung dan Balikpapan Rukindo Shipyard in Jakarta, PMS Surabaya, and Semarang, as well as in collaboration with private shipyards in Batam, Belawan, Surabaya, Makassar, Bitung, and Balikpapan.

KILAS KINERJA

PERFORMANCE

“Pada tahun 2025, Pelindo menunjukkan pertumbuhan kinerja yang signifikan baik dari sisi operasional maupun keuangan. Kinerja Pelindo juga mendapatkan pengakuan dari pihak eksternal dengan diterimanya berbagai penghargaan.”

“In 2025, Pelindo demonstrated significant performance growth, both operationally and financially. Pelindo’s performance also received external recognition through awards.”

Pencapaian Kinerja Penting Tahun 2025

Important Performance Achievements In 2025

- Total aset tahun 2025 mencapai Rp126,05 triliun, menurun 1% dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp127,51 triliun.
- Ekuitas tahun 2025 mencapai Rp50,36 triliun, meningkat 0,34 % dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai Rp50,19 triliun.
- Pendapatan operasi tahun 2025 mencapai Rp35,48 triliun, meningkat 9% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai Rp32,53 triliun.
- Realisasi arus kapal dalam satuan call tahun 2025 mencapai 369.813 Call, meningkat 16% dibandingkan tahun 2024 yang ekuivalen dengan 318.623 unit.
- Realisasi arus kapal dalam satuan GT tahun 2025 sebesar 1.422.887.719 GT, meningkat 1% dibandingkan tahun 2024 yang ekuivalen dengan 1.402.921.700 GT.
- Realisasi arus petikemas dalam satuan Teus tahun 2025 sebesar 19.785.539 Teus, meningkat 5% dibandingkan tahun 2024 sebesar 18.807.089 Teus.
- Realisasi arus barang non petikemas dalam satuan Ton tahun 2025 mencapai 195.168.554 Ton, menurun 3% dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 201.182.095 Ton.
- Realisasi arus barang non petikemas dalam satuan M^3 tahun 2025 mencapai 6.461.240 M3, menurun 7% dibandingkan tahun 2024 yang mencapai6.927.6484 M3.
- Realisasi arus barang non petikemas dalam satuan unit tahun 2025 mencapai 3.069.156 Unit, meningkat 7% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai 2.873.887 Unit.

- Total assets in 2025 reached Rp126.05 trillion, a 1% decrease compared to Rp127.51 trillion in 2024.
- Equity in 2025 reached Rp50.36 trillion, a 0.34% increase compared to Rp50.19 trillion in 2024.
- Operating revenue in 2025 reached Rp35.48 trillion, a 9% increase compared to Rp32.53 trillion in 2024.
- Realized vessel traffic in terms of calls in 2025 reached 369,813 calls, a 16% increase compared equivalent to 318,623 units in 2024.
- Realized ship traffic in GT units in 2025 reached 1,422,887,719 GT, a 1% increase compared equivalent to 1,402,921,700 GT in 2024.
- Realized container traffic in TEUs in 2025 reached 19,785,539 TEUs, a 5% increase compared to 18,807,089 TEUs in 2024.
- Realized non-containerized goods traffic in tons in 2025 reached 195,168,554 tons, a 3% decrease compared to 201,182,095 tons in 2024.
- Realized non-containerized goods traffic in cubic meters (m^3) in 2025 reached 6,461,240 m3, a 7% decrease compared to 6,927,648 m3 in 2024.
- Realized non-containerized goods traffic in units in 2025 reached 3,069,156 units, a 7% increase compared to 2,873,887 units in 2024.

- Realisasi arus barang non petikemas dalam satuan MMBTU tahun 2025 mencapai 15.943.575 MMBTU, meningkat 14 % dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai 13.971.183 MMBTU.
- Realisasi arus barang non petikemas dalam satuan Ekor tahun 2025 mencapai 787.682 Ekor mengalami kenaikan 6% dibandingkan tahun 2024 mencapai 739.717 Ekor.Realisasi arus penumpang pada tahun 2025 sebesar 20.434.569 Orang, meningkat 5% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 19.443.897 Orang.

- Realized non-containerized goods traffic in units of MMBTU in 2025 reached 15,943,575 MMBTU, a 14% increase compared to 13,971,183 MMBTU in 2024.
- Realized non-containerized goods traffic in units of Tail in 2025 reached 787,682 units, a 6% increase compared to 739,717 units in 2024. Realized passenger traffic in 2025 reached 20,434,569 people, a 5% increase compared to the previous year's 19,443,897 people.

PELINDO
INDONESIA MARITIME GATEWAY

Ikhtisar Keuangan 2025

2025 Financial Highlight

Ikhtisar Data Keuangan Penting
Summary of Key Financial Data

IKHTISAR KEUANGAN DAN RASIO KEUANGAN

FINANCIAL SUMMARY AND FINANCIAL RATIOS

Tabel Ikhtisar Data Keuangan dan Rasio Keuangan
Financial Data and Financial Ratio Overview

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	2023	2022	2021
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION					
ASET ASSETS					
ASET LANCAR CURRENT ASSETS					
Kas dan setara kas Cash and cash equivalents	**15.567.392.704**	20.352.943.946	12.491.274.250	13.597.640.823	12.922.388.587
Investasi jangka pendek Short-term investments	**264.233.122**	375.942.057	3.769.584.376	3.943.051.999	5.718.525.973
Piutang Usaha –neto Trade receivables - net					
Pihak Ketiga Third parties	**1.461.815.335**	1.557.342.021	1.056.562.835	1.130.425.885	1.253.132.841
Pihak Berelasi Related parties	**468.936.129**	455.819.901	291.600.099	319.681.316	263.129.705
Piutang lain-lain – neto Trade receivables - net					
Pihak Ketiga Third parties	**56.625.406**	26.776.429	44.613.085	54.645.010	126.988.519
Pihak Berelasi Related parties	**149.634.818**	154.908.237	170.985.810	392.181.781	1.153.378.016
Uang muka dan beban dibayar di muka Advances and prepaid expenses	**561.941.006**	413.926.915	208.543.807	225.480.260	258.677.724
Pendapatan masih akan diterima Accrued revenues					
Pihak Ketiga Third parties	**42.821.661**	105.072.119	572.269.934	543.670.248	297.585.161
Pihak Berelasi Related parties	**194.673.861**	174.234.826	152.492.130	107.559.957	33.383.321
Persediaan Inventories	**310.200.546**	277.992.453	270.428.290	276.990.511	217.674.563
Pajak dibayar di muka Prepaid taxes	**815.689.473**	774.443.272	1.190.287.684	972.176.643	1.080.535.298

Tabel Ikhtisar Data Keuangan dan Rasio Keuangan
Financial Data and Financial Ratio Overview

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	**2025**	**2024**	**2023**	**2022**	**2021**
Aset lancar lainnya Other current assets	**1.555.904.806**	1.342.811.421	100.458.674	56.662.961	55.194.659
Total Aset Lancar Total Current Assets	**21.449.868.866**	**26.012.213.597**	**20.319.100.974**	**21.620.167.394**	**23.380.594.367**
ASET TIDAK LANCAR NON-CURRENT ASSETS					
Investasi Jangka Panjang Long-term investments	**4.496.780.394**	5.012.419.887	4.708.437.323	4.118.791.190	3.751.638.877
Properti investasi – neto Investment properties - net	**2.105.464.893**	1.323.604.656	1.380.726.349	1.233.319.427	873.433.978
Aset tetap – neto Fixed assets - net	**42.263.350.916**	41.042.837.467	40.513.752.433	45.033.835.147	46.300.182.922
Aset kerjasama operasi – neto Joint operation assets - net	**364.526.924**	368.258.512	358.909.828	379.887.734	408.013.146
Aset hak-guna – neto Right-of-use assets - net	**827.239.304**	786.222.536	454.253.106	453.988.347	452.002.189
Aset pajak tangguhan Deferred tax assets	**2.239.828.188**	1.356.130.261	844.098.609	632.879.439	587.268.838
Aset tak berwujud – neto Intangible assets - net	**42.897.155.187**	43.523.228.617	43.426.805.946	42.546.542.738	38.760.454.848
Aset kontrak - tidak lancar Contract assets - non-current	**6.635.265.469**	5.281.379.972	3.455.637.322	-	-
Taksiran tagihan restitusi pajak Estimated claims for tax refund	**851.589.997**	1.142.420.387	1.348.106.857	1.109.658.955	750.660.351
Aset tidak lancar lainnya Other non-current assets	**1.923.735.582**	1.659.019.867	1.531.236.928	1.221.507.535	964.824.984
Total Aset Tidak Lancar Total Non-current Assets	**104.604.936.853**	101.495.522.162	98.021.964.701	96.730.410.512	92.848.480.133
TOTAL ASET TOTAL ASSETS	**126.054.805.719**	**127.507.735.759**	**118.341.065.675**	**118.350.577.906**	**116.229.074.500**
LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITIES AND EQUITY					
LIABILITAS LIABILITIES					
LIABILITAS JANGKA PENDEK CURRENT LIABILITIES					
Pinjaman bank jangka pendek Short-term bank loans	**-**	-	3.330.172	105.361.831	5.196.855
Utang usaha Trade payables	**-**	-	-	-	-
Pihak Ketiga Third parties	**803.956.602**	766.047.682	620.890.592	976.563.635	1.338.142.064

Tabel Ikhtisar Data Keuangan dan Rasio Keuangan
Financial Data and Financial Ratio Overview

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	2023	2022	2021
Pihak Berelasi Related parties	**128.326.253**	96.565.849	636.747.827	1.092.012.208	1.926.350.211
Pendapatan diterima di muka jangka pendek Short-term unearned revenues	**1.685.524.258**	1.659.298.580	1.393.628.171	1.594.355.077	1.298.045.484
Utang pajak Taxes payable	**580.175.753**	500.490.093	885.558.244	1.025.273.741	578.540.987
Beban akrual Accrued expenses	**9.414.369.378**	6.666.411.251	5.419.485.908	5.273.585.288	3.699.192.020
Bagian lancar atas liabilitas jangka panjang Current maturities of long term liabilities					
Utang obligasi Bonds payable	**49.988.389**	18.446.568.351	7.574.312.147	8.637.804.928	-
Utang Bank Bank loans	**4.294.440.048**	1.068.675.471	445.526.921	152.606.159	2.365.898.747
Liabilitas Sewa Lease liabilities	**363.576.600**	134.702.846	70.113.816	49.907.726	76.345.578
Liabilitas jangka pendek lainnya Other current liabilities					
Pihak Ketiga Third parties	**755.771.691**	517.102.900	434.970.358	855.825.793	1.182.432.796
Pihak Berelasi Related parties	**385.664.948**	879.167.406	689.389.394	185.307.298	1.066.277.650
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek	**429.519.134**	463.764.537	-	-	-
Total Liabilitas Jangka Pendek Total Current Liabilities	**18.891.313.053**	**31.198.794.966**	**18.173.953.550**	**19.948.603.684**	**13.536.422.392**
LIABILITAS JANGKA PANJANG NON-CURRENT LIABILITIES					
Liabilitas jangka Panjang- setelah dikurangi bagian lancar Long term liabilities- net of current portion					
Utang obligasi Bonds payable	**8.487.957.191**	8.249.264.237	25.549.740.350	34.116.829.197	40.176.176.480
Utang Bank Bank loans	**34.095.339.441**	23.447.068.879	13.901.255.263	7.678.666.058	6.656.343.511
Liabilitas Sewa Lease liabilities	**442.519.425**	775.556.684	417.609.648	385.228.086	257.540.134
Utang lembaga keuangan non-bank Loans from non-bank financial institution					
Pihak Ketiga Third parties	**-**	763.941.899	697.862.861	-	-

Tabel Ikhtisar Data Keuangan dan Rasio Keuangan
Financial Data and Financial Ratio Overview

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	2023	2022	2021
Pihak Berelasi Related parties	-	1.502.045.095	1.372.013.613	1.744.763.266	1.426.042.655
Liabilitas pajak tangguhan Deferred tax liabilities	**84.857.757**	91.699.230	86.843.304	231.128.682	105.071.621
Pendapatan diterima di muka jangka panjang Non current unearned revenue	**5.069.291.460**	5.164.017.893	4.192.970.146	4.544.771.276	4.495.055.535
Libilitas Jangka Panjang Lainnya Other long-term liabilities	**955.431.661**	820.081.369	838.428.454	1.126.588.038	962.389.202
Liabilitas imbalan kerja Employee benefit liabilities	**7.670.491.965**	5.308.412.758	6.269.173.328	5.769.306.844	6.560.923.531
Total Liabilitas Jangka Panjang Total Non-current Liabilities	**56.805.888.900**	**46.122.088.044**	**53.325.896.967**	**55.597.281.447**	**60.639.542.669**
TOTAL LIABILITAS TOTAL LIABILITIES	**75.697.201.953**	**77.320.883.010**	**71.499.850.517**	**75.545.885.131**	**74.175.965.061**
EKUITAS EQUITY					
EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK **EQUITY ATTRIBUTABLE TO OWNERS OF THE PARENT ENTITY**					
Modal saham Share capital	**40.575.584.000**	40.575.584.000	40.575.584.000	40.575.584.000	8.475.067.000
Modal donasi Donated capital	**26.825.982**	26.825.982	26.825.982	26.825.982	26.825.982
Tambahan modal disetor Additional paid-in capital	**(33.358.048.450)**	(33.358.048.450)	(33.358.048.450)	(33.358.048.450)	(1.128.322.898)
Komponen ekuitas lainnya Other equity component	**1.466.121**	1.466.121	1.466.121	1.466.121	1.466.121
Selisih nilai transaksi dengan pihak non pengendali Difference in value of transactions with non-controling interest	**836.905.071**	836.905.071	836.905.071	836.905.071	836.072.934
Ekuitas *merging entity* Merging entity equity	-	-	-	-	-
Saldo laba Retained earnings	**-**	-	-	-	-
Ditentukan penggunaannya Appropriated	**38.962.857.822**	37.079.792.756	34.296.140.473	31.900.794.522	29.925.514.788
Belum ditentukan penggunaannya Unappropriated	**5.304.105.426**	4.726.606.443	4.964.897.779	4.915.321.447	4.434.909.230

Tabel Ikhtisar Data Keuangan dan Rasio Keuangan
Financial Data and Financial Ratio Overview

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	2023	2022	2021
Penghasilan komprehensif lain Other comprehensive income	**(3.457.292.320)**	(1.792.048.331)	(2.373.018.577)	(3.774.159.697)	(2.062.503.591)
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk – neto Equity attributable to owners of the parent entity - net	**48.892.403.652**	**48.097.083.592**	**44.970.752.399**	**41.124.688.996**	**40.509.029.566**
Kepentingan nonpengendali Non-controlling interests	**1.465.200.114**	2.089.769.157	1.870.462.759	1.680.003.779	1.544.079.873
EKUITAS NETO EQUITY - NET	**50.357.603.766**	**50.186.852.749**	**46.841.215.158**	**42.804.692.775**	**42.053.109.439**
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS TOTAL LIABILITIES AND EQUITY	**126.054.805.719**	**127.507.735.759**	**118.341.065.675**	**118.350.577.906**	**116.229.074.500**
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN **CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME**					
Pendapatan operasi* Operating revenues*	**35.483.466.435**	32.526.653.316	31.018.217.702	29.718.289.381	28.814.806.337
Beban operasi* Operating expenses	**(27.379.179.603)**	(26.148.238.472)	(24.343.231.471)	(23.154.429.191)	(22.409.393.233)
Pendapatan (beban) operasi lainnya – neto Other operating (expenses) income - net	**(677.565.468)**	(86.637.989)	310.596.193	567.854.026	235.348.501
LABA USAHA INCOME FROM OPERATIONS	**8.104.286.832**	**6.378.414.844**	**6.674.986.231**	**6.563.860.190**	**6.405.413.103**
Pendapatan keuangan Finance income	**900.264.463**	838.881.229	627.295.432	380.490.269	409.327.451
Beban keuangan Finance costs	**(2.934.950.935)**	(3.009.706.000)	(2.860.119.853)	(2.571.042.968)	(2.596.316.636)
Bagian laba entitas asosiasi Equity in income of associates	**433.063.192**	540.555.119	370.377.560	303.407.163	209.978.801
LABA SEBELUM PAJAK DAN PAJAK PENGHASILAN BADAN INCOME BEFORE FINAL TAX AND CORPORATE INCOME TAX	**5.825.098.084**	**4.661.507.203**	**5.123.135.563**	**5.244.568.681**	**4.663.751.221**
Beban pajak final Final tax expense	**(730.626.924)**	(680.063.269)	(515.481.368)	(488.229.302)	(488.424.859)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BADAN INCOME BEFORE CORPORATE INCOME TAX	**5.094.471.160**	**3.981.443.934**	**4.607.654.195**	**4.756.339.379**	**4.175.326.362**
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN BADAN CORPORATE INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)					
Kini Current	**(1.144.790.711)**	(886.121.839)	(999.545.702)	(958.337.498)	(847.733.176)

Tabel Ikhtisar Data Keuangan dan Rasio Keuangan
Financial Data and Financial Ratio Overview

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	2023	2022	2021
Tangguhan Deferred	**413.625.324**	707.815.249	404.472.770	128.153.222	(151.447.911)
LABA TAHUN BERJALAN INCOME FOR THE YEAR	**4.363.305.774**	**3.803.137.344**	**4.012.581.263**	**3.926.155.103**	**3.176.145.276**
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN **OTHER COMPREHENSIVE INCOME**					
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi Item that will not be reclassified to profit or loss					
Pengukuran kembali program imbalan pasti - neto setelah pajak Remeasurements of defined benefit plans - net off tax	**1.184.747**	763.117.936	9.333.500	823.295.840	94.351.746
Perubahan nilai wajar aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain Change in fair value of financial assets at fair value through other comprehensive income	**138.276.933**	(173.841.358)	108.703.163	87.470.875	(47.180.224)
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi Item that will be reclassified to profit or loss					
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan Exchange differences due to financial statements translation	**125.244.907**	102.980.463	(30.153.334)	198.045.650	13.379.913
Bagian Efektif dari Keuntungan dan kerugian instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas Effective portion of gains andlosses on hedging instrument in relation to cash flow hedge	**(195.747.907)**	(111.286.795)	1.313.257.791	(2.820.468.471)	
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR	**4.432.264.454**	**4.384.107.590**	**5.413.722.383**	**2.196.813.751**	**3.236.696.711**
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA: INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:					
Pemilik entitas induk Owners of the parent entity	**4.121.549.627**	3.583.830.947	3.822.122.283	3.772.545.951	3.292.133.734
Kepentingan nonpengendali Non-controlling interests	**241.756.146**	219.306.398	190.458.980	135.923.906	(115.988.458)

Tabel Ikhtisar Data Keuangan dan Rasio Keuangan
Financial Data and Financial Ratio Overview

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	2023	2022	2021
LABA TAHUN BERJALAN INCOME FOR THE YEAR	**4.363.305.773**	**3.803.137.345**	**4.012.581.263**	**3.908.469.857**	**3.176.145.276**
Penyesuaian atas laba *merging entity*: Adjustments to income from merging entity					
Pemilik entitas induk Owners of the parent entity	**-**	-	-	-	(2.280.313.686)
Kepentingan non-pengendali Non-controlling interests	**-**	-	-	-	130.572.397
LABA TAHUN BERJALAN SEBELUM EFEK PENYESUAIAN LABA *MERGING ENTITY* YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA: INCOME FOR THE CURRENT YEAR BEFORE THE EFFECT OF MERGING ENTITY PROFIT ADJUSTMENTS ATTRIBUTABLE TO:					
Pemilik entitas induk Owners of the parent entity	**-**	-	-	3.772.545.951	1.011.820.048
Kepentingan non-pengendali Non-controlling interests	**-**	-	-	135.923.906	14.583.939
LABA TAHUN BERJALAN SEBELUM EFEK PENYESUAIAN LABA MERGING ENTITY	**-**	**-**	**-**	**3.908.469.857**	**1.026.403.987**
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA: INCOME FOR THE CURRENT YEAR BEFORE ADJUSTMENTS FROM MERGING ENTITY					
Pemilik entitas induk Owners of the parent entity	**4.190.508.307**	4.164.801.193	5.223.263.403	2.060.889.845	3.351.776.051
Kepentingan non-pengendali Non-controlling interests	**241.756.146**	219.306.398	190.458.980	135.923.906	(115.079.340)
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN TOTAL COMPREHENSIVE PROFIT FOR THE CURRENT YEAR	**4.432.264.453**	**4.384.107.591**	**5.413.722.383**	**2.196.813.751**	**3.236.696.711**
Penyesuaian atas laba komprehensif lainnya *merging entity*: Adjustments to other comprehensive income from merging entity:					
Pemilik entitas induk Owners of the parent entity	**-**	-	-	-	(2.170.608.365)

Tabel Ikhtisar Data Keuangan dan Rasio Keuangan
Financial Data and Financial Ratio Overview

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	2023	2022	2021
Kepentingan non-pengendali Non-controlling interests	-	-	-	-	129.586.062
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN SEBELUM EFEK PENYESUAIAN LABA *MERGING ENTITY* YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA: TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (EXPENSE) FOR THE CURRENT YEAR BEFORE THE EFFECT OF MERGING ENTITY PROFIT ADJUSTMENTS ATTRIBUTABLE TO:					
Pemilik entitas induk Owners of the parent entity	-	-	-	2.060.889.845	1.181.167.686
Kepentingan non-pengendali Non-controlling interests	-	-	-	135.923.906	14.506.722
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN SEBELUM EFEK PENYESUAIAN LABA *MERGING ENTITY* TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE CURRENT YEAR BEFORE THE EFFECT OF MERGING ENTITY PROFIT ADJUSTMENTS	-	-	-	**2.196.813.751**	**1.195.674.408**
LABA PER SAHAM DASAR (nilai penuh) BASIC EARNINGS PER SHARE (full amount)	**102.557**	**88.325**	**94.198**	**92.976**	**81.136**
LABA PER SAHAM DILUSIAN (nilai penuh) DILUTED EARNINGS PER SHARE (full amount)	**101.242**	**87.192**	**92.990**	**91.783**	**80.095**

*Tidak memperhitungkan pendapatan dan beban konstruksi
*Excluding construction revenue and expenses

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS					
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES					
Penerimaan kas dari pelanggan Cash receipts from customers	**35.488.258.130**	35.081.096.090	32.547.015.738	31.671.281.588	30.056.470.288
Penerimaan pendapatan bunga Receipt of interest income	**158.955.682**	138.307.745	147.125.596	132.629.570	156.818.218

Tabel Ikhtisar Data Keuangan dan Rasio Keuangan
Financial Data and Financial Ratio Overview

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	2023	2022	2021
Pembayaran kepada kontraktor. pemasok dan lainnya Payment to contractors. suppliers and others	**(21.090.934.600)**	(14.689.152.169)	(12.428.584.108)	(14.592.877.976)	(14.481.551.070)
Pembayaran kepada karyawan Payment to employees	**(5.605.354.721)**	(7.407.666.379)	(6.373.858.615)	(5.662.070.239)	(5.661.556.853)
Pembayaran pajak penghasilan Payment for income taxes	**(1.276.784.824)**	(1.210.529.494)	(1.187.161.753)	(1.396.604.110)	(1.319.862.044)
Penerimaan (pembayaran) pajak Tax receipts (payments)	**486.432.713**	288.092.252	(179.477.232)	949.549.254	1.078.288.509
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi Net Cash Provided by Operating Activities	**8.160.572.380**	**12.200.148.045**	**12.525.059.626**	**11.101.908.087**	**9.828.607.048**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES					
Pencairan investasi jangka pendek Withdrawal of short-term investments	**52.920.000**	-	653.637.459	2.245.190.808	5.742.520.260
Penerimaan dividen Receipt of dividend	**185.531.783**	181.804.647	469.784.726	366.126.855	322.271.932
Hasil penjualan aset tetap Proceed on sales assets	**27.790.798**	11.889.146	3.736.904	37.117.004	(1.969.868)
Pencairan investasi jangka pendek Redemption of short-term investments	**852.989.150**	4.074.963.760	-	-	-
Perolehan aset tetap. properti investasi dan aset tak berwujud Acquisition of fixed assets. investment properties and intangible assets	**(2.624.617.264)**	(5.140.358.970)	(7.371.717.546)	(6.511.011.701)	(6.908.699.330)
Penempatan kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya Placement of restricted cash and cash equivalents	**(1.424.986.903)**	(1.268.054.099)	-	-	-
Penyertaan saham Investment in shares	**-**	-	(40.970.691)	(395.591.435)	(2.674.308.254)
Pembayaran uang muka aset tetap Fixed asset down payments	**(351.554.124)**	(27.848.535)	-	-	-

Tabel Ikhtisar Data Keuangan dan Rasio Keuangan
Financial Data and Financial Ratio Overview

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	2023	2022	2021
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi Net Cash Used in Investing Activities	**(3.281.926.560)**	**(2.167.604.051)**	**(6.285.529.148)**	**(4.258.168.469)**	**(3.520.185.260)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES					
Setoran modal Capital injection	**-**	-	-	-	1.201.500.000
Pembayaran pinjaman bank dan utang obligasi Payment of bank loans and bonds payable	**(27.164.733.851)**	(8.089.799.531)	(11.074.117.654)	(4.221.618.857)	(4.345.416.914)
Penerimaan pinjaman Receipt of loans	**22.633.108.904**	9.928.858.552	8.513.257.386	1.983.144.166	1.611.983.309
Pembayaran bunga Interest payment	**(2.758.777.627)**	(2.991.656.809)	(2.854.269.807)	(2.512.723.161)	(2.752.569.073)
Pembayaran dividen Payment of dividend	**(1.788.523.268)**	(1.152.575.231)	(1.453.964.849)	(1.316.854.000)	(560.000.000)
Pembayaran liabilitas sewa Payments of lease liabilities	**(585.313.070)**	(185.720.560)	(417.597.215)	(138.892.333)	(162.741.729)
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan Net Cash Used in Financing Activities	**(9.664.238.912)**	**(2.490.893.579)**	**(7.286.692.139)**	**(6.206.944.185)**	**(5.007.244.407)**
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS	**-**	**-**	**(1.047.161.661)**	**636.795.433**	**1.301.177.381**
Dampak perubahan selisih kurs terhadap kas dan setara kas Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents	**41.849**	320.019.281	(59.204.912)	38.456.803	8.154.416
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE YEAR	**20.352.943.946**	**12.491.274.250**	**13.597.640.823**	**12.922.388.587**	**11.613.056.790**
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF YEAR	**15.567.392.704**	**20.352.943.946**	**12.491.274.250**	**13.597.640.823**	**12.922.388.587**
RASIO KEUANGAN (%) FINANCIAL RATIOS					
Rasio Laba (Rugi) Terhadap Jumlah Aset (%) Profit (Loss) to Total Assets Ratio (%)	**3,44**	3,09	3,39	3,33	2,71

Tabel Ikhtisar Data Keuangan dan Rasio Keuangan

Financial Data and Financial Ratio Overview

(dalam ribuan Rupiah) (in thousand Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	2023	2022	2021
Rasio Laba (Rugi) Terhadap Ekuitas (%) Profit (Loss) to Equity Ratio (%)	**8,68**	7,84	8,95	9,21	7,72
Rasio Laba (Rugi) Terhadap Pendapatan (%) Profit (Loss) to Revenue Ratio (%)	**12,30**	11,69	12,94	13,16	11,02
Cash Ratio (kali) Cash Ratio (times)	**0,84**	0,66	0,89	0,88	1,38
Current ratio (kali) Current ratio (times)	**1,14**	0,83	1,12	1,08	1,73
Quick ratio (kali) Quick ratio (times)	**0,94**	0,73	0,97	0,95	1,49
Rasio Liabilitas Terhadap Ekuitas (%) Liabilities to Equity Ratio (%)	**0,93**	1,07	1,53	1,76	1,76
Rasio Liabilitas Terhadap Jumlah Aset (%) Liabilities to Total Assets Ratio (%)	**0,37**	0,42	0,60	0,64	0,64
Operating Ratio (%) Operating Ratio (%)	**77,16**	80,39	78,48	77,96	78,23
Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset (%) Own Capital to Total Assets Ratio (%)	**2,52**	2,53	2,64	2,76	2,85
Average payment period (app) (hari) Average payment period (app) (days	**14,52**	18,83	33,00	51,00	74,00
Average collection period (acp) (hari) Average collection period (acp) (days)	**20,28**	19,43	16,00	18,00	19,00
Collection period (hari) Collection period (days)	**19,86**	22,59	16,00	18,00	19,00

*Disajikan kembali
Keterangan: Data Ikhtisar Keuangan mengikuti Laporan Keuangan Pasca Merger
Catatan untuk pembaca laporan: Tabel dan grafik pada laporan ini memaparkan data numerik dengan standar Bahasa Indonesia. sedangkan pemaparan numerik dalam teks menggunakan standar Bahasa Inggris dan Indonesia sesuai dengan konteksnya.
*Restated
Note: Financial Overview Data follows the Post-Merger Financial Report
Note to report readers: The tables and graphs in this report present numerical data using standard Indonesian. while the numerical presentation in the text uses standard English and Indonesian according to the context.

IKHTISAR OPERASIONAL

OPERATIONAL OVERVIEW

Tabel Kinerja Operasional
Operational Performance

Uraian Description	Satuan Unit	2025	2024*	2023	2022	2021
OPERASI KEPELABUHAN PORT OPERATIONS						
Arus Kapal Ship Traffic						
Dermaga Umum Public Wharves						
Internasional International	Unit	**24.964**	23.560	24.163	16.232	11.805
	GT	**249.663.336**	234.237.429	239.923.806	208.507.972	201.654.893
Domestik Domestic	Unit	**131.502**	129.303	126.274	120.335	121.331
	GT	**396.250.132**	405.489.753	374.782.831	338.489.677	365.275.148
Total Dermaga Umum Total Public Wharves	**Unit**	**156.466**	**152.863**	**150.437**	**136.567**	**133.136**
	GT	**645.913.468**	**639.727.182**	**614.706.637**	**546.997.649**	**566.930.041**
Non Dermaga Umum Non-Public Wharves						
Internasional International	Unit	**18.191**	15.163	15.799	16.700	16.383
	GT	**218.803.785**	248.563.665	200.654.730	218.902.310	283.355.015
Domestik Domestic	Unit	**195.156**	150.597	136.985	137.703	105.150
	GT	**558.170.466**	514.630.853	470.679.382	435.914.575	335.932.191
Total Non Dermaga Umum Total Non-General Wharves	**Unit**	**213.347**	**165.760**	**152.784**	**154.403**	**121.533**
	GT	**776.974.251**	**763.194.518**	**671.334.112**	**654.816.885**	**619.287.206**
Total Arus Kapal Total Ship Traffic	**Unit**	**369.813**	**318.623**	**303.221**	**290.970**	**254.669**
	GT	**1.422.887.719**	**1.402.921.700**	**1.286.040.750**	**1.201.814.534**	**1.186.217.247**
Arus Petikemas Container Traffic						
Internasional International	Box	**5.924.880**	5.662.205	5.367.984	5.250.679	5.230.284
	TEUs	**9.243.302**	8.700.826	8.146.911	7.965.736	7.872.429
Domestik Domestic	Box	**8.950.903**	8.636.275	8.205.975	8.041.423	8.003.971
	TEUs	**10.542.237**	10.106.263	9.510.416	9.254.576	9.184.205
Total Arus Petikemas Total Container Traffic	**Box**	**14.875.783**	**14.298.480**	**13.573.959**	**13.292.102**	**13.234.255**
	TEUs	**19.785.539**	**18.807.089**	**17.657.327**	**17.220.312**	**17.056.634**

*) Sesuai dengan Standardisasi Pencatatan Arus Kapal
*) Adjusted to the Standardization of Vessel Traffic

Tabel Kinerja Operasional
Operational Performance

Uraian Description	**Satuan** Unit	**2025**	**2024***	**2023**	**2022**	**2021**
Arus Barang Non Petikemas Non-Container Traffic						
Dermaga Umum Public Wharves	Ton	**125.758.845**	125.714.712	129.681.464	131.711.836	117.613.268
	m^3	**6.385.948**	6.863.971	6.560.498	5.590.046	4.494.597
	Unit	**3.066.552**	2.872.352	2.647.693	2.441.155	1.519.404
	MMBTU	**15.943.575**	13.971.183	13.188.848	8.800.934	7.820.960
	Ekor Heads	**787.682**	739.717	563.244	503.694	635.120
Non Dermaga Umum Non-Public Wharves	Ton	**69.409.709**	75.467.383	40.171.944	28.016.000	28.587.541
	m^3	**75.292**	63.677	14.886	14.472	21.040
	Unit	**2.604**	1.535	1.286	-	-
Total Arus Barang Non Petikemas Total Non-Container Traffic	**Ton**	**195.168.554**	**201.182.095**	**169.853.408**	**159.727.836**	**146.200.809**
	m^3	**6.461.240**	**6.927.648**	**6.575.384**	**5.604.518**	**4.515.637**
	Unit	**3.069.156**	**2.873.887**	**2.648.979**	**2.441.155**	**1.520.794**
	MMBTU	**15.943.575**	**13.971.183**	**13.188.848**	**8.800.934**	**7.820.960**
	Ekor Heads	**787.682**	**739.717**	**563.244**	**503.694**	**635.120**
ARUS PENUMPANG PASSENGER TRAFFIC						
Luar Negeri Overseas						
Embarkasi Embarkation	Orang People	**913.159**	773.861	704.275	383.533	338
Debarkasi Debarkation	Orang People	**818.344**	691.402	599.919	304.151	1.538
Jumlah Luar Negeri Total Overseas	**Orang** People	**1.731.503**	**1.465.263**	**1.304.194**	**687.684**	**1.876**
Dalam Negeri Domestic						
Embarkasi Embarkation	Orang People	**9.494.075**	8.998.716	8.560.921	7.201.720	4.085.873
Debarkasi Debarkation	Orang People	**9.208.991**	8.979.918	8.185.817	7.139.480	3.969.156
Jumlah Dalam Negeri Total Domestic	**Orang** People	**18.703.066**	**17.978.634**	**16.746.738**	**14.341.200**	**8.055.029**
Jumlah Total	**Orang** People	**20.434.569**	**19.443.897**	**18.050.932**	**15.028.884**	**8.056.905**

Tabel Kinerja Operasional
Operational Performance

Uraian Description	Satuan Unit	2025	2024*	2023	2022	2021
JASA LAINNYA OTHER SERVICES						
Pengusahaan Properti Property Operations						
Pengusahaan Lahan **Land Concession**						
Sewa Leases	m^2	**15.082.967**	16.845.050	15.827.285	13.741.662	33.742.879
Throughput Fee/Kontribusi Throughput Fee/Contribution	Ton	**11.221.057**	9.303.921	10.885.631	5.224.184	9.178.471
Pengusahaan Bangunan Building Business	m^2	**756.559**	1.076.382	159.690	122.679	877.833
Pengusahaan Air/Listrik Water/Electricity Business						
Pengusahaan Air **Water Business**	**Ton**	**4.048.169**	**3.884.222**	**5.082.416**	**2.642.361**	**3.639.497**
Pengusahaan Listrik Electricity Business	**KWh**	**47.691.326**	**44.599.514**	**41.943.130**	**41.982.517**	**43.806.538**

INFORMASI SAHAM

Modal ditempatkan dan disetor penuh tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebanyak 40.575.584.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham, sehingga total modal ditempatkan dan disetor penuh adalah sebesar Rp40.575.584.000.000.000.

Sampai dengan 31 Desember 2025, Pelindo belum mencatatkan sahamnya di bursa saham. Dengan demikian, tidak terdapat informasi harga saham, kapitalisasi pasar saham, dan volume perdagangan saham. Sedangkan informasi modal saham selama dua tahun terakhir disajikan sebagai berikut:

STOCK INFORMATION

Issued and fully paid capital as of December 31, 2025 and 2024 was 40,575,584 shares with a nominal value of Rp1,000,000 per share, so the total issued and fully paid capital was Rp40,575,584,000,000.

As of December 31, 2025, Pelindo has not listed its shares on the stock exchange. Therefore, there is no information to report on stock price, stock market capitalization, and stock trading volume. The share capital information for the last two years is presented as follows:

Tabel Harga Saham
Share Price

(dalam ribuan Rupiah) (in thousands of Rupiah)

Uraian Description	2025	2024
Modal saham Share capital	**40.575.584.000**	40.575.584.000

AKSI KORPORASI

Pada tahun 2025, Pelindo tidak melakukan Aksi Korporasi terkait dengan aktivitas yang berpengaruh terhadap jumlah saham beredar, seperti pemecahan saham, penggabungan saham, dividen saham, saham bonus, perubahan nilai nominal saham, penerbitan efek konversi, serta penambahan dan pengurangan modal.

CORPORATE ACTIONS

In 2025, Pelindo will not undertake any Corporate Actions related to activities that impact the number of outstanding shares, such as stock splits, stock mergers, stock dividends, bonus shares, changes in share par value, issuance of convertible securities, or capital increases or decreases.

AKSI PENGHENTIAN SEMENTARA PERDAGANGAN SAHAM *(SUSPENSION)* DAN/ATAU PENGHAPUSAN PENCATATAN SAHAM *(DELISTING)*

Sampai dengan 31 Desember 2025, Pelindo tidak pernah dikenakan sanksi penghentian sementara perdagangan saham *(suspension)* dan/atau penghapusan pencatatan saham *(delisting)*.

TEMPORARY SUSPENSION OF STOCKTRADING AND/OR DELISTING OF STOCK

Until December 31, 2025, Pelindo has never been subject to sanctions in the form of temporary suspension of stock trading and/or delisting of stock.

INFORMASI OBLIGASI, SUKUK, DAN/ATAU OBLIGASI KONVERSI

BONDS, SUKUK AND/OR CONVERTIBLE BOND INFORMATION

INFORMASI OBLIGASI

BONDS INFORMATION

Tabel Informasi Obligasi Pelindo
Pelindo Bonds Information

Uraian Description	**Tanggal Penerbitan** Date Issued	**Tenor**	**Mata Uang** Currency	**Jumlah Obligasi (Juta)** Amount of Bonds (million)	**Harga Penawaran** Offering Price	**Tanggal Jatuh Tempo** Maturity Date	**Tingkat Suku Bunga** Interest Rate	**Status Pembayaran** Payment Status	**Peringkat** Rating		**Wali Amanat** Trustee
									2025	**2024**	
Obligasi Domestik (PIGN D) Domestic Bond (PIGN D)	21 Juni 2016 June 21, 2016	10 Tahun 10 years	IDR	50.000	100%	21 Juni 2026 June 21, 2026	9,75%	Belum Lunas Not yet Paid	idAAA/ *Stable*	idAAA/ *Stable*	Bank Tabungan Negara (Persero)
Obligasi Global Global Bond	5 Mei 2015 May 5, 2015	10 Tahun 10 years	USD	1.100	98,99%	5 Mei 2025 May 5, 2025	4,25%	Lunas Paid	Moody's: Baa2 *(Stable outlook)* Fitch: BBB *(Stable)*	Moody's: Baa3 *(Stable outlook)* Fitch: BBB *(Stable)*	The Bank of New york Mellon
Obligasi Global Global Bond	5 Mei 2015 May 5, 2015	30 Tahun 30 years	USD	500	98,17%	5 Mei 2045 May 5, 2025	5,38%	Belum Lunas Not yet Paid	Moody's: Baa2 *(Stable outlook)* Fitch: BBB *(Stable)*	Moody's: Baa2 *(Stable outlook)* Fitch: BBB *(Stable)*	The Bank of New york Mellon
Obligasi Domestik (PIKI B) Domestic Bond (PIKI B)	5 Juli 2018 July 5, 2018	7 Tahun 7 years	IDR	1.820.000	100%	5 Juli 2025 July 5, 2025	9,15%	Lunas Paid	idAAA/ *Stable*	idAAA/ *Stable*	Bank Tabungan Negara (Persero)
Obligasi Domestik (PIKI C) Domestic Bond (PIKI C)	5 Juli 2018 July 5, 2018	10 Tahun 10 years	IDR	800.000	100%	5 Juli 2028 July 5, 2028	9,35%	Belum Lunas Not yet Paid	idAAA/ *Stable*	idAAA/ *Stable*	Bank Tabungan Negara (Persero)

INFORMASI SUKUK

Sampai dengan 31 Desember 2025, Pelindo belum menerbitkan sukuk.

SUKUK INFORMATION

As of December 31, 2025, Pelindo has not issued sukuk.

OBLIGASI KONVERSI

Sampai dengan 31 Desember 2025, Pelindo belum menerbitkan obligasi konversi.

CONVERTIBLE BONDS

As of December 31, 2025, Pelindo has not issued convertible bonds.

INFORMASI SUMBER PENDANAAN LAINNYA

Per 31 Desember 2025, Pelindo tidak memiliki sumber pendanaan lainnya.

INFORMATION ON OTHER FUNDING SOURCES

As of December 31, 2025, Pelindo has no other funding sources

Peristiwa Penting
Important Events

Tanggal Date	Peristiwa Event	Foto
23 Januari 2025 January 23, 2025	Rapat Umum Pemegang Saham Pelindo di Ciawi dengan kegiatan: 1. Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2025 dan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2025. 2. Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA-TJSL) Tahun 2025. 3. Penetapan Kontrak Manajemen Tahunan yang memuat Target *Key Performance Indicators* (KPI) Direksi secara Kolegial dan Dewan Komisaris Tahun 2025. 4. Persetujuan Pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan apabila terdapat tindakan-tindakan yang mengakibatkan perubahan alokasi anggaran investasi dengan nilai maksimum 10% (sepuluh persen) dari nilai masing-masing program investasi sepanjang tidak merubah total nilai investasi. 5. Kegiatan dihadiri oleh Pemegang Saham yang dihadiri oleh KBUMN, Notaris, BOD, BOC. Pelindo's General Meeting of Shareholders in Ciawi included the following activities: 1. Approval of the 2025 Corporate Work Plan and Budget (RKAP) and the 2025 Board of Commissioners Work Plan and Budget. 2. Approval of the 2025 Social and Environmental Responsibility Program Work Plan and Budget (RKA-TJSL). 3. Determination of the Annual Management Contract, including the 2025 Key Performance Indicators (KPI) targets for the Board of Directors and the Board of Commissioners. 4. Approval of the delegation of authority to the Board of Commissioners to approve any actions resulting in changes to investment budget allocations, with a maximum value of 10% (ten percent) of the value of each investment program, provided that the total investment value remained unchanged. 5. The event was attended by Shareholders, including the State-Owned Enterprises (KBUMN), Notary, Board of Directors (BOD), and Board of Commissioners (BOC).	
12 Februari 2025 February 12, 2025	MoU Penyelenggaraan Pelayanan di Bidang Pelayaran bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bertujuan meningkatkan efisiensi, integrasi, dan keselamatan pelayaran, terutama pelayaran rakyat, perintis (PSO), dan operasional pelabuhan. MoU ini mencakup sinergi pelayanan, digitalisasi, dan peningkatan kompetensi SDM transportasi laut. Perjanjian kerja sama dengan 2 (dua) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut merupakan wujud komitmen dan sinergitas serta profesionalitas antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagai regulator, dan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), serta PT Pelabuhan Indonesia (Persero) sebagai mitra kerja pemerintah. An MoU on Shipping Service Delivery with the Ministry of Transportation (Kemenhub) to improve the efficiency, integration, and safety of shipping, particularly for small-scale and pioneer shipping (PSO) and port operations. This MoU encompasses service synergy, digitalization, and competency development of maritime transportation personnel. The cooperation agreement with the two State-Owned Enterprises (BUMN) demonstrates the commitment, synergy, and professionalism between the Directorate General of Sea Transportation as the regulator, PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), and PT Pelabuhan Indonesia (Persero) as government partners.	

Tanggal Date	Peristiwa Event	Foto
21 Februari 2025 February 21, 2025	Kapal Cruise 3 bersandar di Pelabuhan Benoa yaitu Silver Nova yakni kapal pesiar mewah dengan panjang 244 meter yang membawa total 1.185 penumpang dan kru, Queen Elizabeth yang memiliki panjang 293 meter dan membawa 2.927 penumpang serta kru dan Viking Sky dengan panjang 228 meter dan 1.311 penumpang dan kru. Ketiga kapal pesiar yang sandar bersamaan tersebut menunjukkan bahwa Pelabuhan Benoa semakin menjadi destinasi utama kapal pesiar internasional dan berpotensi menjadi *home port* untuk kegiatan kapal pesiar di masa mendatang. Three cruise ships docked at Benoa Harbor: the Silver Nova, a 244-meter luxury cruise ship carrying 1,185 passengers and crew; the 293-meter Queen Elizabeth, carrying 2,927 passengers and crew; and the 228-meter Viking Sky, carrying 1,311 passengers and crew. The three cruise ships docking together demonstrates that Benoa Harbor is increasingly becoming a prime destination for international cruise ships and has the potential to become a home port for cruise ship activities in the future.	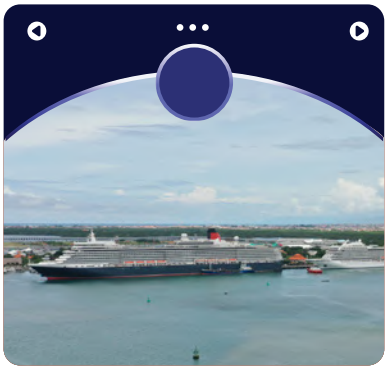
28 Februari 2025 February 28, 2025	Pelabuhan Benoa Bali disinggahi kapal pesiar mewah Anthem of the Seas milik Royal Carribean Group. Kapal tersebut dinyatakan sebagai kapal pesiar terbesar yang pernah bersandar di Indonesia. Kedatangan kapal persiar itu bertujuan untuk kolaborasi semakin erat dengan para operator pelayaran global, termasuk Royal Carribean International, untuk menjadikan Indonesia sebagai pelabuhan bagi kapal pesiar internasional. Area yang dijamah pun meluas ke luar Bali, seperti Labuan Bajo, Lombok, dan Raja Ampat. The luxury cruise ship Anthem of the Seas, owned by Royal Caribbean Group, called at Benoa Port in Bali. The ship is said to be the largest cruise ship ever to dock in Indonesia. The cruise ship's arrival aims to strengthen collaboration with global cruise operators, including Royal Caribbean International, to establish Indonesia as a port of call for international cruise ships. The destinations also extend beyond Bali to include Labuan Bajo, Lombok, and Raja Ampat.	
14 Maret 2025 March 14, 2025	Penandatanganan MoU dengan IBC tentang Implmentasi Ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) dan Energy Storage System (ESS) di lingkungan Pelabuhan. Kolaborasi ini bertujuan untuk menerapkan solusi energi baru dan terbarukan dalam operasional terminal dan mengevaluasi efektivitas sebagai dasar penyusunan strategi implementasi skala penuh. Signing of an MoU with IBC for the Battery-Based Electric Vehicle Ecosystem (KBLBB) and Energy Storage System (ESS) in the Ports. This collaboration aims to implement new and renewable energy solutions in terminal operations and evaluate their effectiveness as a basis for developing a full-scale implementation strategy.	
25 Maret 2025 March 25, 2025	Perjanjian kontrak sementara sewa barang milik negara (BMN) antara kepala PPN Tual dengan Direktur PT Betha Sonang Energi. Kegiatan didampingi oleh Ketua Tim Kerja Tata Kelola dan Pelayanan Usaha serta Penanggung Jawab SPKT Saumlaki. Perjanjian kontrak sementara ini merupakan bagian dari proses perikatan kontrak dalam masa menunggu persetujuan pemanfaatan sewa BMN yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Selain itu sebagai wujud komitmen dari pihak pengguna jasa dalam mendukung investasi di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Ukurlaran. A temporary lease agreement for state assets (BMN) was signed between the Head of the PPN Tual and the Director of PT Betha Sonang Energi. The event was organized by the Head of the Governance and Business Services Working Team and the Person in Charge of the Saumlaki SPKT. This temporary lease agreement is part of the contractual agreement process while awaiting approval for the use of the BMN lease issued by the State Assets and Auction Services Office (KPKNL). It also demonstrates the service user's commitment to supporting investment in the Ukurlaran Coastal Fisheries Port (PPP).	

Tanggal Date	Peristiwa Event	Foto
26 Maret 2025 March 26, 2025	*Flag Off* Mudik Gratis Pelindo 2025 dijadwalkan berlangsung pada 26 Maret 2025. Program ini merupakan bagian dari inisiatif "Mudik Aman Sampai Tujuan" oleh Kementerian BUMN, di mana Pelindo turut serta memberangkatkan peserta ke berbagai tujuan dari titik keberangkatan yang ditentukan. *Flag Off* Mudik Gratis Pelindo 2025 bertujuan melepaskan peserta mudik secara resmi untuk memastikan perjalanan yang aman, nyaman, dan selamat hingga kampung halaman, serta mendukung kebijakan pemerintah dalam mengurangi kemacetan dan risiko kecelakaan selama arus mudik Lebaran 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial BUMN dalam memfasilitasi kebutuhan mudik masyarakat. The 2025 Pelindo Free Homecoming Flag Off is scheduled for March 26, 2025. This program is part of the Ministry of BUMN "Safe Homecoming to Your Destination" initiative, in which Pelindo assists participants in departing to destinations from designated departure points. The 2025 Pelindo Free Homecoming Flag Off aims to officially send off participants to ensure a safe, comfortable, and secure journey home, while also supporting government policies to reduce congestion and the risk of accidents during the 2025 Eid homecoming. This activity is part of the BUMN social responsibility to facilitate the community's homecoming needs.	
27 Mei 2025 May 27, 2025	Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu untuk mengatasi masalah pendangkalan alur pelabuhan. Kunjungan ini bertujuan mempercepat normalisasi alur guna mengamankan distribusi logistik dan energi, serta menindaklanjuti antrean BBM di SPBU Kota Bengkulu. Vice President Gibran Rakabuming Raka visited Pulau Baai Port in Bengkulu to address the problem of shallowing of the port channel. The visit aimed to expedite the normalization of the channel to secure logistics and energy distribution, as well as address fuel queues at gas stations in Bengkulu City.	
17 Juni 2025 June 17, 2025	Delegasi Maritim Belanda mengunjungi Pelindo Regional 2 di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kunjungan tersebut adalah bagian dari rangkaian kegiatan misi ekonomi Belanda ke Indonesia. Rombongan Belanda dipimpin oleh Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Marc Gerritsen, dan Wakil Menteri urusan Hubungan Ekonomi Luar Negeri Belanda, Michiel Sweers beserta jajaranya berjumlah sekitar 40 orang. Agenda kunjungan difokuskan pada diskusi mengenai pelayanan kapal, penataan pelabuhan, pola operasional Pelindo dalam implementasi program kerja, hingga potensi kerja sama investasi antara kedua negara. Setelah diskusi dan pengenalan singkat profile Pelabuhan Tanjung Priok, delegasi Belanda meninjau langsung area operasional pelabuhan Kalibaru, NPCT-1 untuk melihat infrastruktur dan suprastruktur pelabuhan serta memahami lanskap industri kelautan nasional, termasuk kontribusi pelabuhan terhadap konektivitas logistik di kawasan Asia Tenggara. A Dutch maritime delegation visited Pelindo Regional 2 at Tanjung Priok Port, North Jakarta. The visit was part of a series of activities by the Dutch economic mission to Indonesia. The Dutch delegation was led by the Dutch Ambassador to Indonesia, Marc Gerritsen, and the Deputy Minister for Foreign Economic Relations, Michiel Sweers, with approximately 40 staff. The visit focused on discussions regarding ship services, port management, Pelindo's operational patterns in implementing work programs, and potential investment cooperation between the two countries. Following the discussion and a brief introduction to the Port of Tanjung Priok, the Dutch delegation toured the operational area of Kalibaru Port, NPCT-1, to see the port's infrastructure and superstructure and understand the national maritime industry landscape, including the port's contribution to logistics connectivity in the Southeast Asian region.	

Tanggal Date	Peristiwa Event	Foto
18 Juni 2025 June 18, 2025	FGD dan Press Conference ASEAN Ports and Logistics 2025 digelar di Jakarta. Pelindo mendorong sinergi maritim, kolaborasi regional, serta konektivitas pelabuhan dengan kawasan industri *(hinterland)* di Asia Tenggara. Fokus bahasan dalam acara ini adalah kolaborasi ekosistem pelabuhan/logistik, integrasi Pelindo dengan hinterland industri (seperti Java Integrated & Industrial Port Estate/JIIPE dan Terminal Kijing), serta peningkatan daya saing logistik ASEAN. The ASEAN Ports and Logistics 2025 Focus Group Discussion (FGD) and a Press Conference were held in Jakarta. Pelindo (Indonesia's state-owned port operator) promoted maritime synergy, regional collaboration, and port connectivity with industrial areas (hinterlands) in Southeast Asia. The event focused on port/logistics ecosystem collaboration, Pelindo's integration with industrial hinterlands (such as the Java Integrated & Industrial Port Estate/JIIPE and Kijing Terminal), and enhancing ASEAN's logistics competitiveness.	
24 Juni 2025 June 24, 2025	Rapat Umum Pemegang Saham Pelindo dengan agenda: 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan. 2. Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2024, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024. 3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024. 4. Penetapan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas, dan tunjangan) Tahun Buku 2025 dan Tantiem Tahun Buku 2024 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. 5. Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2025. 6. Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara. 7. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pelindo's General Meeting of Shareholders, with the following agenda: 1. Approval of the Annual Report and Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements. 2. Approval of the Board of Commissioners' Supervisory Report and Ratification of the Financial Statements of the Micro and Small Enterprise Funding Program (PUMK) for the 2024 Fiscal Year, as well as granting full release and discharge (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors for their management of the Company and to the Board of Commissioners for their supervisory actions carried out during the 2024 Fiscal Year. 3. Determination of the Use of the Company's Net Profit for the 2024 Fiscal Year. 4. Determination of remuneration (salary/honorarium, facilities, and allowances) for the 2025 Fiscal Year and Tantiem for the 2024 Fiscal Year for the Company's Board of Directors and Board of Commissioners. 5. Appointment of a Public Accountant (AP) and/or Public Accounting Firm (KAP) to audit the Company's Consolidated Financial Statements and the Financial Statements of the Micro and Small Enterprise Funding Program (PUMK) for the 2025 Fiscal Year. 6. Report on the Realization of the Use of Additional State Equity Participation Funds. 7. Amendments to the Company's Articles of Association	

Tanggal Date	Peristiwa Event	Foto
1 Juli 2025 July 1, 2025	Asean Port & Logistics 2025 Exhibition and Conference, sebagai acara dagang tahunan terbesar dibidang pelabuhan dan logistik di kawasan Asean, yang akan mempertemukan para pemimpin industri, pengambil keputusan dan akademisi untuk membahas perkembangan global dan regional terbaru yang membentuk perdagangan dan investasi. ASEAN Ports and Logistics 2025 dihadiri oleh lebih dari 300-400 eksekutif maritim, profesional logistik, pemilik kargo, serta pembicara internasional dari berbagai negara ASEAN. Acara ini diselenggarakan oleh Pelindo bekerja sama dengan CILT Indonesia dan dihadiri oleh para pengambil keputusan di sektor kepelabuhanan. The ASEAN Port & Logistics 2025 Exhibition and Conference, the largest annual port and logistics trade event in the ASEAN region, will bring together industry leaders, decision-makers, and academics to discuss the latest global and regional developments shaping trade and investment. ASEAN Ports and Logistics 2025 was attended by over 300-400 maritime executives, logistics professionals, cargo owners, and international speakers from various ASEAN countries. The event was organized by Pelindo in collaboration with CILT Indonesia and was attended by decision-makers in the port sector.	
18 Juli 2025 July 18, 2025	*Courtesy Meeting Between* Pelindo and Romania Embassy yang dihadiri oleh Dan Adrian Balanescu Duta Besar Romania, dan Direktur Utama Arif Suhartono. Kunjungan tersebut adalah bagian dari rangkaian kegiatan misi ekonomi Romania ke Indonesia. Courtesy Meeting between Pelindo and the Romanian Embassy, attended by Romanian Ambassador Dan Adrian Balanescu, and President Director Arif Suhartono. The visit was part of a series of activities from the Romania's economic mission to Indonesia.	
Agustus 2025 August 2025	Pelindo *Group* menyemarakkan HUT RI ke-80 pada Agustus 2025 dengan serangkaian lomba dan kegiatan seru di berbagai regional, seperti Surabaya, Banten, Makassar, dan Medan. Kegiatan ini bertujuan memperkuat kekompakan karyawan, manajemen, dan keluarga besar Pelindo melalui berbagai perlombaan, jalan sehat, serta bazar UMKM. Pelindo Group celebrated the 80th anniversary of the Republic of Indonesia in August 2025 with a series of exciting competitions and activities in the regions, including Surabaya, Banten, Makassar, and Medan. These activities aim to strengthen the cohesiveness of employees, management, and the Pelindo family through competitions, fun walks, and MSME bazaars.	
14 Agustus 2025 August 14, 2025	PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo bersama Badan Pusat Statistik (BPS) sepakat mempererat kerja sama penyediaan, pertukaran, serta pemanfaatan data dan/atau informasi bidang statistik jasa kepelabuhanan. Sinergi ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman. PT Pelabuhan Indonesia (Persero), or Pelindo, and the Central Statistics Agency (BPS) agreed to strengthen cooperation in the provision, exchange, and use of data and/or information on port services statistics. This synergy was marked by the signing of a memorandum of understanding.	

Tanggal Date	Peristiwa Event	Foto
8 September 2025 September 8, 2025	KRI Brawijaya-320, *frigate* Pattugliatore Polivalente d'Altura (PPA) terbesar di Asia Tenggara, tiba dan disambut resmi di Dermaga 107, Pelabuhan JICT, Tanjung Priok. Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menyambut kapal ini yang menempuh 44 hari perjalanan dari Italia untuk memperkuat pertahanan laut TNI AL. Kedatangan disambut langsung oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali, Direktur Strategi Pelindo Prasetyo. KRI Brawijaya-320, the largest Pattugliatore Polivalente d'Altura (PPA) frigate in Southeast Asia, arrived and was officially welcomed at Pier 107, JICT Port, Tanjung Priok. Defense Minister Sjafrie Sjamsoeddin welcomed the ship, which had traveled 44 days from Italy to strengthen the Indonesian Navy's maritime defenses. The arrival was welcomed by Defense Minister Sjafrie Sjamsoeddin, TNI Commander General Agus Subiyanto, and Navy Chief of Staff Admiral Muhammad Ali, and Pelindo Strategy Director Prasetyo.	
12 September 2025 September 12, 2025	Pelindo kembali masuk dalam daftar Fortune Indonesia 100 tahun 2025 (berdasarkan kinerja 2024), menegaskan posisinya sebagai salah satu perusahaan terbesar di Indonesia. Pelindo menempati peringkat ke-4 dalam sektor infrastruktur dan peringkat ke-37 secara keseluruhan dari 100 perusahaan terbesar. Pencapaian ini didorong oleh kinerja positif dan transformasi pasca-merger. Pelindo re-entered the 2025 the Fortune Indonesia 100 list (based on 2024 performance), confirming its position as one of the largest companies in Indonesia. Pelindo ranks fourth in the infrastructure sector and 37th overall among the 100 largest companies. This achievement is driven by positive performance and post-merger transformation.	
17 September 2025 September 17, 2025	Upacara Peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2025 mengusung tema "Bakti Transportasi Untuk Negeri". Dilaksanakan pada 17 September 2025 untuk merefleksikan kerja keras di sektor darat, laut, udara, dan perkeretaapian. Sambutan Menteri Perhubungan RI, Dudy Purwagandhi, dibacakan untuk mengapresiasi kinerja insan perhubungan dalam memberikan pelayanan aman dan nyaman. The 2025 National Transportation Day (Harhubnas) Commemoration Ceremony carried the theme "Transportation Service for the Nation" was held on September 17, 2025, to reflect the hard work of the land, sea, air, and railway sectors. A speech by the Indonesian Minister of Transportation, Dudy Purwagandhi, was delivered to recognize the performance of transportation personnel in providing safe and comfortable services.	

Tanggal Date	Peristiwa Event	Foto
2 Oktober 2025 October 2, 2025	PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) menggelar Pelindo Business Engagement 2025 dengan tema “Ports And Industrial Integration” pada 3–5 Oktober 2025 di Bali. Acara tahunan ini menjadi sarana strategis untuk mempererat hubungan antara Pelindo dan para pelanggan, sekaligus memperkenalkan kawasan industri serta area potensial yang terintegrasi dengan pelabuhan Pelindo. Acara ini menghadirkan *Managing Director Business* 3 PT Danantara Aset Management, Febriany Eddy sebagai pembicara utama *(keynote speech)*, Deputy Infrastruktur Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, Abdul Malik, serta sesi pemaparan testimoni dari VP External Affairs Smelters PT Freeport Indonesia, Erika Silva, mengenai pengalaman pemanfaatan layanan di Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE). PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) held the Pelindo Business Engagement 2025, themed "Ports and Industrial Integration" on October 3–5, 2025, in Bali. This annual event serves as a strategic platform to strengthen relationships between Pelindo and its customers, while also introducing industrial estates and potential areas integrated with Pelindo's ports. The event featured Febriany Eddy, PT Danantara Aset Management Managing Director of Business 3, as the keynote speaker; Abdul Malik, Deputy for Infrastructure at the Republic of Indonesia National Development Planning Agency; and Erika Silva, VP of External Affairs for Smelters at PT Freeport Indonesia, presented a testimonial on her experience using services at the Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE).	
10 Oktober 2025 October 10, 2025	MoU pertama berfokus pada pembangunan Pengolahan Sampah Energi Listrik (PSEL) sebagai solusi pengelolaan sampah ramah lingkungan. Fasilitas PSEL ini akan mendukung pemerintah daerah dalam menangani permasalahan sampah secara modern sekaligus menghasilkan energi listrik yang bersih dan berkelanjutan. Dalam hal ini, Pelindo turut membantu menyiapkan lahan untuk pembangunan fasilitas tersebut bersama Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kota Denpasar. Sementara itu, MoU kedua mencakup percepatan pengembangan Bali Maritime Tourism Hub (BMTH). Proyek strategis ini ditujukan untuk memperkuat posisi Bali sebagai destinasi wisata maritim kelas dunia. Kesepakatan ini meliputi penyesuaian tata ruang kawasan Pelabuhan Benoa, optimalisasi ruang terbuka hijau, pemanfaatan area pelabuhan untuk sektor pariwisata, logistik, dan energi, serta relokasi aktivitas kapal penangkap ikan ke Pelabuhan Pengambengan di Jembrana. Gubernur Bali Wayan Koster bersama Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, dan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Arif Suhartono dan Direktur Komersial Drajat Sulistyo menandatangani dua nota kesepahaman (MoU) di Kantor Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Bali. The first MoU focused on the development of a Waste-to-Energy Power Plant (PSEL) as an environmentally friendly waste management solution. This PSEL facility will support local governments in addressing waste issues in a modern way while generating clean and sustainable electricity. Pelindo is assisting in land preparation for the facility's construction, with the Bali Provincial Government and the Denpasar City Government. While, the second MoU covered the acceleration of the development of the Bali Maritime Tourism Hub (BMTH). This strategic project aims to strengthen Bali's position as a world-class maritime tourism destination. The agreement covered spatial adjustments to the Benoa Port area, optimization of green open spaces, use of the port area for tourism, logistics, and energy, and the relocation of fishing vessel activity to Pengambengan Port in Jembrana. Bali Governor Wayan Koster, Badung Regent I Wayan Adi Arnawa, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) President Director Arif Suhartono and Commercial Director Drajat Sulistyo signed two memorandums of understanding (MoUs) at the Bali Provincial Government Liaison Office.	

Tanggal Date	Peristiwa Event	Foto
19 November 2025 November 19, 2025	Partisipasi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dalam Uji Publik Komisi Informasi Pusat merupakan wujud komitmen perusahaan dalam mendukung keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari penerapan *Good Corporate Governance* serta akuntabilitas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Melalui kegiatan ini, manajemen Pelindo menegaskan dukungan terhadap peningkatan transparansi badan publik serta komitmen untuk terus memperkuat kualitas layanan informasi yang cepat, tepat, dan akurat. PT Pelabuhan Indonesia (Persero)'s participation in the Central Information Commission's Public Test demonstrates the Company's commitment to supporting public information transparency as part of *Good Corporate Governance* implementation and accountability to the public and stakeholders. Through this activity, Pelindo management affirms its support for increasing transparency in public bodies and its commitment to continuously strengthening the quality of fast, precise, and accurate information services.	
17 Desember 2025 December 17, 2025	ASDP memberangkatkan KMP Jatra I dari Tanjung Priok membawa 44 ton bantuan kemanusiaan untuk Sumatera. Selain itu, Kapal Motor (KM) Egon PELNI juga dilaporkan beroperasi di Dermaga Terminal Penumpang Tanjung Priok. KMP Jatra I: Melanjutkan misi kemanusiaan dengan muatan 44 ton bantuan untuk wilayah Sumatera, diberangkatkan dari Pelabuhan Tanjung Priok pada 17 Desember 2025. KM Egon: Berada di Dermaga Terminal Penumpang Pelabuhan Tanjung Priok untuk mendukung pengiriman bantuan, dengan rute tujuan Teluk Bayur (Sumbar), Belawan (Sumut), dan Krueng Geukueh (Aceh). ASDP dispatched the KMP Jatra I from Tanjung Priok carrying 44 tons of humanitarian aid for Sumatra. Also, the PELNI Motor Ship (KM) Egon was reported to be operating at the Tanjung Priok Passenger Terminal Pier. KMP Jatra I: Continuing its humanitarian mission with a cargo of 44 tons of aid for the Sumatra region, departed from Tanjung Priok Port on December 17, 2025. KM Egon: Stationed at the Tanjung Priok Port Passenger Terminal Pier to support aid delivery, en route to Teluk Bayur (West Sumatra), Belawan (North Sumatra), and Krueng Geukueh (Aceh).	

PELINDO
INDONESIA MARITIME GATEWAY

Laporan Direksi dan Dewan Komisaris

Board of Directors and Board of Commissioners' Report

Pada tahun 2025 Perseroan berhasil meningkatkan pendapatan operasi mencapai Rp36,73 triliun, meningkat 5,44% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai Rp34,83 triliun.

In 2025, the Company successfully increased its operating revenue to Rp36.73 trillion, a 5.44% increase compared to Rp34.83 trillion in 2024.

Laporan Direksi
Board of Directors' Report

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang terhormat,

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, di tengah tantangan perekonomian dan dinamika industri maritim serta kepelabuhanan, Pelindo tetap mampu mencatatkan berbagai pencapaian penting sepanjang tahun 2025. Perseroan melanjutkan transformasi pasca integrasi yang berfokus pada standarisasi operasional, optimalisasi jaringan pelabuhan, dan penguatan tata kelola. Upaya tersebut mendorong peningkatan produktivitas, kualitas layanan, serta efisiensi operasional. Selain itu, pengembangan ekosistem digital melalui platform terintegrasi terus dilakukan guna meningkatkan transparansi, kecepatan layanan, dan kemudahan akses bagi seluruh pemangku kepentingan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah kami menyampaikan laporan jalannya kepengurusan Perseroan untuk Tahun buku 2025 yang meliputi kinerja Perseroan, analisis prospek Perseroan, perkembangan penerapan tata kelola perusahaan, penilaian kinerja Komite di bawah Direksi serta perubahan komposisi Direksi.

ANALISIS ATAS KINERJA PERSEROAN

KONDISI PEREKONOMIAN YANG SECARA LANGSUNG BERDAMPAK TERHADAP KINERJA PERSEROAN

Setelah perjuangan panjang melawan inflasi pada tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2025 mayoritas bank sentral utama berhasil mencapai pendaratan ekonomi yang mulus (*soft landing*). Pertumbuhan PDB global pada tahun 2025 stabil 3,3%. Inflasi mulai menjinak mendekati target 2%, yang memungkinkan pelonggaran kebijakan moneter secara bertahap. Namun, pertumbuhan ini tidak merata. Sementara Amerika Serikat tetap kuat berkat konsumsi domestik, Eropa masih berjuang dengan biaya energi yang fluktuatif, dan Cina terus bertransisi dari model pertumbuhan berbasis properti menuju manufaktur teknologi tinggi.

Lebih jauh, tahun 2025 ditandai oleh pengenaan tarif oleh Amerika Serikat dalam jumlah relatif signifikan terhadap hampir semua *partner* perdagangan negara tersebut. Sampai dengan Triwulan IV tahun 2025, rate efektif tarif Amerika Serikat masih tetap tinggi di level 19% dan ketegangan dalam perdagangan internasional masih mendominasi hubungan perdagangan antara AS dengan Cina dan *partner* utama perdagangan AS seperti Kanada dan Mexico.

Dear Shareholders and Stakeholders,

We would like to express our gratitude to God Almighty for His abundant grace and blessings. Despite the economic challenges and dynamics of the maritime and port industry, Pelindo recorded a number of important achievements in 2025. The Company continued its post-integration transformation, focusing on operational standardization, port network optimization, and strengthening governance, in order to drive increased productivity, service quality, and operational efficiency. In addition, the development of a digital ecosystem through an integrated platform helped to enhance transparency, service speed, and ease of access for all stakeholders.

Let us take this opportunity to present our report on the Company's management for the 2025 fiscal year covering the Company's performance, an analysis of our prospects, developments in corporate governance implementation, performance assessments of the Committees below the Board of Directors, and changes in the Board of Directors composition.

COMPANY PERFORMANCE ANALYSIS

ECONOMIC CONDITIONS THAT DIRECTLY IMPACTED COMPANY PERFORMANCE

After a long struggle against inflation in previous years, most major central banks achieved a soft economic landing in 2025. Global GDP growth in 2025 was projected to stabilize at 3.3%. Inflation has begun to ease towards the 2% target, allowing for gradual monetary policy easing. However, this growth is uneven. While the United States remains strong thanks to domestic consumption, Europe continues to struggle with volatile energy costs, and China continues its transition from a property-based growth model to high-tech manufacturing.

Furthermore, 2025 will be marked by the imposition of relatively significant tariffs by the United States on nearly all of its trading partners. As of QIV 2025, the effective US tariff rate remained high at 19%, and international trade tensions continued to dominate trade relations between the US and China and key US trading partners such as Canada and Mexico.

Di tengah pemulihan ekonomi global yang semakin stabil namun masih berlangsung tidak merata, perekonomian Indonesia pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang tetap tangguh. Hal ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11%, meningkat dibandingkan capaian tahun 2024 sebesar 5,03%. Dari sisi produksi, lapangan usaha jasa lainnya mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 9,93%, sementara dari sisi pengeluaran, komponen ekspor barang dan jasa tumbuh paling tinggi sebesar 7,03%, sejalan dengan menguatnya perdagangan global. Pertumbuhan tersebut terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha, kecuali sektor penggalian dan pertambangan yang mengalami kontraksi sebesar 0,66%. Di sisi lain, tingkat inflasi Indonesia pada tahun 2025 tercatat sebesar 2,92% (yoy), masih berada dalam kisaran sasaran nasional sebesar 1,5%–3,5%, meskipun lebih tinggi dibandingkan inflasi tahun 2024 sebesar 1,57% (yoy). Secara komparatif, tingkat inflasi Indonesia juga relatif lebih tinggi dibandingkan beberapa negara seperti Amerika Serikat sebesar 2,7% (yoy), Singapura sebesar 1,2% (yoy), dan India sebesar 1,33% (yoy), yang mencerminkan dinamika domestik di tengah tren normalisasi inflasi global.

Amidst an increasingly stable but still uneven global economic recovery, the Indonesian economy demonstrated a resilient performance in 2025. This was reflected in economic growth of 5.11%, an increase compared to 5.03% in 2024. On the production side, the other services sector recorded the highest growth at 9.93%, while on the expenditure side, exports of goods and services grew the highest at 7.03%, in line with strengthening global trade. This growth occurred across nearly all business sectors, except for the quarrying and mining sector, which contracted by 0.66%. On the other side, Indonesia's inflation rate in 2025 was 2.92% (yoy), still within the national target range of 1.5%–3.5%, although higher than the 1.57% (yoy) inflation rate in 2024. Comparatively, Indonesia's inflation rate is relatively higher than several countries, such as the United States (2.7% yoy), Singapore (1.2% yoy), and India (1.33% yoy), reflecting domestic dynamics amidst the global inflation normalization trend.

Dari sisi industri pelabuhan, secara global perekonomian dunia diproyeksikan tetap bertumbuh, namun pengaruhnya terhadap pertumbuhan volume kontainer diprediksi menurun yang ditunjukkan dengan penurunan *multiplier* TEUs-PDB. Pada tahun 2025 perekonomian global mencapai sekitar USD117,2 triliun, meningkat dari sekitar USD111,1 triliun pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan berlanjutnya pemulihan ekonomi global setelah periode perlambatan pada tahun-tahun sebelumnya, serta menunjukkan stabilitas pertumbuhan yang konsisten menuju tren jangka panjang. Pertumbuhan pada tahun 2025 juga menjadi bagian dari tren peningkatan rata-rata sekitar 4% per tahun, yang menandakan bahwa aktivitas ekonomi global tetap berada dalam jalur ekspansi yang sehat. Tren kenaikan ini mencerminkan keberlanjutan aktivitas ekonomi global yang didukung oleh normalisasi kegiatan ekonomi, perbaikan rantai pasok, serta peningkatan produktivitas melalui adopsi teknologi di berbagai sektor industri.

From the port industry perspective, the global economy is projected to continue growing, but its impact on container volume growth is expected to decline, as seen in a decline in the TEUs-GDP multiplier. In 2025, the global economy was projected to reach approximately USD 117.2 trillion, up from approximately USD 111.1 trillion in 2024. This increase reflects the continued global economic recovery after a period of slowdown in previous years and demonstrates consistent growth stability toward the long-term trend. Growth in 2025 was also part of an average annual increase of approximately 4%, indicating that global economic activities remain on a healthy expansionary path. This upward trend reflects the sustainability of global economic activities; supported by the normalization of economic activities, supply chain improvements, and increased productivity through the adoption of technology across many industrial sectors.

Secara umum arus non-petikemas Indonesia mengalami pertumbuhan yang stabil namun moderat selama periode 2020–2024, dengan CAGR sekitar 5,2%. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh segmen curah kering yang mendominasi lebih dari 82% total volume dan tumbuh konsisten dari 1.567 menjadi 1.930 juta ton. Hal ini mengindikasikan bahwa struktur logistik Indonesia masih sangat bergantung pada komoditas berbasis sumber daya alam seperti batu bara dan mineral. Sementara itu, curah cair relatif stagnan di kisaran 10%, mencerminkan pertumbuhan yang terbatas pada komoditas energi cair, sedangkan general cargo dan kendaraan justru menunjukkan tren penurunan kontribusi (dari 7,6% ke 7,1%), yang dapat mengindikasikan pergeseran ke arah kontainerisasi atau efisiensi distribusi barang jadi.

Overall, Indonesia's non-containerized cargo traffic saw a stable but moderate growth during the 2020–2024 period, with a CAGR of approximately 5.2%. This growth was primarily driven by the dry bulk segment, which dominated more than 82% of the total volume and grew consistently from 1,567 million tons to 1,930 million tons. This shows that Indonesia's logistics structure remains heavily reliant on natural resource-based commodities such as coal and minerals. While, liquid bulk remained relatively stagnant at around 10%, reflecting limited growth in liquid energy commodities. While general cargo and vehicles actually showed a downward trend in their contribution (from 7.6% to 7.1%), which could indicate a shift toward containerization or efficiency in the distribution of finished goods.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITERAPKAN OLEH PERSEROAN

Dalam menghadapi kondisi perekonomian dan industri pelabuhan tersebut, Perseroan telah menetapkan berbagai strategi usaha yang diperlukan. Tahun 2025, Pelindo masuk dalam fase *Integrated Connectivity* yang berfokus pada:

1. Pengembangan konektivitas multimoda dan integrasi *hinterland* melalui sinergi dengan BUMN.
2. Kolaborasi dengan perusahaan Kawasan Industri untuk pengembangan *port-KI Integration*.
3. Kolaborasi dengan *cargo owner* dan pelaku industri logistik untuk distribusi barang secara *end-to-end.*
4. Pengembangan *operatorship* untuk Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS)/Pelabuhan Kementerian/ Lembaga (K/L).
5. Kolaborasi dengan pelayaran domestik untuk optimalisasi *hub and spoke*.
6. Standardisasi digitalisasi dan sistematisasi layanan operasional.

Penyusunan strategi Pelindo mengacu pada arah kebijakan BUMN dalam RPJPN 2025-2045 yang menekankan peningkatan daya saing, penciptaan nilai tambah, serta penguatan peran BUMN sebagai market leader baik di tingkat domestik maupun global. Dalam dokumen RPJMN 2025-2029 yang menetapkan sasaran pembangunan nasional serta 8 (delapan) prioritas nasional. Dari keseluruhan prioritas nasional tersebut, Prioritas Nasional ke-5 memiliki keterkaitan langsung dengan peran strategis Pelindo, yaitu melanjutkan hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Implementasi prioritas ini menekankan pentingnya penguatan sistem logistik nasional melalui pembangunan infrastruktur konektivitas, optimalisasi layanan *backbone* logistik, serta integrasi ekosistem logistik secara *end-to-end*.

PERANAN DIREKSI DALAM PERUMUSAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN STRATEGIS

Direksi memegang peranan sentral dalam merumuskan arah strategis Perseroan guna memastikan keberlanjutan kinerja dan penciptaan nilai jangka panjang. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Direksi secara aktif menyusun strategi dan kebijakan strategis dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan usaha, kondisi industri, serta peluang dan risiko yang dihadapi Perseroan. Proses perumusan dilakukan secara komprehensif melalui analisis kinerja, proyeksi bisnis, serta evaluasi terhadap efektivitas implementasi strategi sebelumnya.

Direksi juga memastikan bahwa setiap kebijakan strategis yang ditetapkan selaras dengan visi, misi, serta tujuan jangka panjang Perseroan, sekaligus mendukung arah kebijakan pemegang saham dan regulasi yang berlaku. Dalam prosesnya, Direksi melibatkan seluruh fungsi

STRATEGIES AND STRATEGIC POLICIES IMPLEMENTED BY THE COMPANY

To address these economic and port industry conditions, the Company established the necessary business strategies. In 2025, Pelindo entered the Integrated Connectivity phase, focusing on:

1. Developing multimodal connectivity and hinterland integration through synergies with BUMN.
2. Collaborating with industrial estate companies to develop port-KI integration.
3. Collaborating with cargo owners and logistics industry players for end-to-end goods distribution.
4. Developing operatorship for Terminals for Own Interest (TUKS)/Ministry/Institutional Ports.
5. Collaborating with domestic shipping companies to optimize hub and spoke systems.
6. Standardizing, digitizing, and systematizing operational services.

Pelindo's strategy development is based on the BUMN policy direction outlined in the 2025-2045 National Medium-Term Development Plan (RPJPN), which emphasized increased competitiveness, the creation of added value, and the strengthening of BUMN's role as domestic and global market leaders. The 2025-2029 RPJMN document established national development targets and eight national priorities. Of these national priorities, National Priority 5 directly related to Pelindo's strategic role: continuing the downstreaming and development of natural resource-based industries to increase domestic added value. Implementation of this priority emphasizes the importance of strengthening the national logistics system through the development of connectivity infrastructure, optimization of backbone logistics services, and end-to-end integration of the logistics ecosystem.

THE ROLE OF THE BOARD OF DIRECTORS IN FORMULATION OF STRATEGIES AND STRATEGIC POLICIES

The Board of Directors plays a central role in formulating the Company's strategic direction to ensure sustainable performance and long-term value creation. When carrying out this function, the Board of Directors actively develops strategic strategies and policies, taking into account the dynamics of the business environment, industry conditions, and the opportunities and risks facing the Company. The formulation process is carried out comprehensively through performance analysis, business projections, and evaluation of the effectiveness of previous strategy implementation.

The Board of Directors also ensures that every strategic policy established aligns with the Company's vision, mission, and long-term goals, while supporting the policy direction of shareholders and applicable regulations. In this process, the Board of Directors involves all relevant

terkait untuk memperoleh perspektif yang holistik, serta mengedepankan prinsip kehati-hatian, tata kelola perusahaan yang baik, dan manajemen risiko yang terintegrasi.

PROSES YANG DILAKUKAN DIREKSI UNTUK MEMASTIKAN IMPLEMENTASI STRATEGI

Direksi memastikan implementasi strategi Perseroan berjalan efektif melalui proses yang terstruktur, terukur, dan berkesinambungan. Tahap awal dilakukan dengan menerjemahkan arah strategis ke dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan yang dilengkapi dengan penetapan indikator kinerja utama (*Key Performance Indicators*/KPI) pada setiap lini organisasi. Selanjutnya, Direksi melakukan penguatan tata kelola implementasi melalui mekanisme koordinasi lintas fungsi, termasuk penyelenggaraan rapat manajemen secara berkala untuk memantau progres pelaksanaan program strategis. Dalam proses ini, Direksi juga memastikan integrasi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian melalui sistem manajemen kinerja yang terukur serta didukung oleh digitalisasi proses bisnis untuk meningkatkan transparansi dan akurasi data.

Direksi turut mengedepankan penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal guna mengidentifikasi potensi kendala serta memastikan langkah mitigasi yang tepat waktu dan efektif. Evaluasi kinerja dilakukan secara periodik dengan membandingkan realisasi terhadap target yang telah ditetapkan, sehingga memungkinkan dilakukannya penyesuaian strategi secara adaptif terhadap dinamika yang terjadi. Dengan proses implementasi yang disiplin dan terintegrasi, Direksi memastikan bahwa setiap inisiatif strategis dapat dieksekusi secara optimal serta memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan jangka panjang Perseroan.

ANALISIS KINERJA PERSEROAN

Pelindo membukukan kinerja yang solid sepanjang tahun 2025, tercermin dari pertumbuhan yang berkelanjutan pada aspek keuangan maupun operasional. Perseroan mencatat peningkatan pendapatan operasi tahun 2025 mencapai Rp36,73 triliun, meningkat 5,44% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai Rp34,83 triliun. Laba tahun berjalan tahun 2025 sebesar Rp4,36 triliun, meningkat 14,73% dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp3,80 triliun. Total aset tahun 2025 mencapai Rp126,05 triliun, menurun sebesar 1,14% dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp127,51 triliun. Pencapaian ini mencerminkan efektivitas strategi transformasi yang dijalankan, khususnya dalam penguatan digitalisasi dan peningkatan kinerja layanan kepelabuhanan.

Dari sisi operasional kepelabuhan, realisasi arus kapal dalam satuan Unit tahun 2025 mencapai 369.813 Unit, meningkat 16,07% dibandingkan tahun 2024 yang ekuivalen dengan 318.623 unit. Demikian pula dengan

functions to obtain a holistic perspective and prioritizes the principles of prudence, good corporate governance, and integrated risk management.

PROCESSES UNDERTAKEN BY THE BOARD OF DIRECTORS TO ENSURE STRATEGY IMPLEMENTATION

The Board of Directors ensures the effective instigation of the Company's strategies through a structured, measurable, and sustainable process. The initial stage involves translating the strategic direction into a company work plan and budget, complemented by the establishment of Key Performance Indicators (KPIs) at every level of the organization. In addition, the Board of Directors strengthens governance implementation through cross-functional coordination mechanisms, including holding regular management meetings to monitor the progress of strategic program implementation. Throughout this process, the Board of Directors also ensures the integration of planning, implementation, and control through a measurable performance management system supported by the digitalization of business processes to increase transparency and data accuracy.

The Board of Directors also prioritizes risk management and internal control systems to identify potential obstacles and ensure timely and effective mitigation measures. Performance evaluations are conducted periodically by comparing actual performance against established targets, allowing for adaptive strategic adjustments to address emerging dynamics. Through a disciplined and integrated process, the Board of Directors ensures that each strategic initiative is optimally executed and makes a tangible contribution to achieving the Company's long-term goals.

COMPANY PERFORMANCE ANALYSIS

Pelindo posted a solid performance throughout 2025, reflected in sustained growth in both financial and operational aspects. The company recorded an increase in operating revenue in 2025 of Rp36.73 trillion, a 5.44% increase compared to Rp34.83 trillion in 2024. Profit for the year in 2025 reached Rp4.36 trillion, a 14.73% increase compared to Rp3.80 trillion in 2024. Total assets in 2025 reached Rp126.05 trillion, a 1.14% decrease compared to Rp127.51 trillion in 2024. These achievements reflect the effectiveness of the transformation strategy, particularly strengthening digitalization and improving port service performance.

From a port operational perspective, the realized ship traffic in units in 2025 reached 369,813 units, a 16.07% increase compared to equivalent to 318,623 units in 2024. Similarly, the realized ship traffic in GT in 2025 was

realisasi arus kapal dalam satuan GT tahun 2025 sebesar 1.422.887.719 GT, meningkat 1,42% dibandingkan tahun 2024 yang ekuivalen dengan 1.402.921.700 GT. Realisasi arus petikemas dalam satuan Box tahun 2025 sebesar 14.875.783 Box, meningkat 4,04% dibandingkan tahun 2024 sebesar 14.298.480 Box. Demikian pula dengan arus petikemas dalam satuan TEUs yang meningkat sebesar 5,20%, dari 18.807.089 TEUs di tahun 2024 menjadi 19.785.539 TEUs di tahun 2025.

Realisasi arus penumpang pada tahun 2025 sebesar 20.434.569 Orang, meningkat 5,10% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 19.443.897 Orang. Dari jasa lainnya, realisasi produksi pengusahaan tahun 2025 dalam satuan Ton mencapai 4.048.169 Ton, meningkat 4,22% dibandingkan realisasi tahun 2024 yang mencapai 3.884.222 Ton. Realisasi produksi pengusahaan listrik di tahun 2025 dalam satuan KWH mencapai 47.691.326 KWH, meningkat 6,93% dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar 44.599.514 KWH. Secara keseluruhan, capaian kinerja tahun 2025 merupakan hasil dari implementasi strategi yang telah ditetapkan di tahun 2025.

PERBANDINGAN ANTARA HASIL YANG DICAPAI DENGAN YANG DITARGETKAN

Dengan menerapkan strategi bisnis di atas, pada tahun 2025 Perseroan telah menghasilkan kinerja yang baik. Pencapaian tersebut terlihat dari terpenuhinya target pada tahun 2025. Capaian arus kapal dalam satuan Unit tahun 2025 mencapai 112,08% dari target RKAP. Sedangkan untuk satuan GT tercapai target RKAP yakni sebesar 100,30%. Arus petikemas dalam satuan Box secara RKAP 2025 tercapai sebesar 103,82% sedangkan dalam satuan TEUs tercapai 105,19%. Arus barang non petikemas dalam satuan Ton tahun 2025 mencapai 102,02% di atas target RKAP. Arus barang non petikemas dalam satuan Unit berhasil melampaui target RKAP yang mencapai 107,56%. Arus barang non petikemas satuan MMBTU terealisasi 15.943.575 MMBTU atau 118,58% dari anggaran tahun 2025. Arus hewan terealisasi 787.682 Ekor atau 122,07% bila dibandingkan anggaran tahun 2025. Arus penumpang terealisasi 20.434.569 Orang atau 103,17% bila dibandingkan dengan anggaran tahun 2025.

Aset Pelindo menunjukkan kinerja yang melampaui target, dengan total realisasi mencapai Rp126,05 triliun atau 103,03% dari RKAP 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh pencapaian aset lancar sebesar 114,20% dan aset tidak lancar sebesar 101,00%. Di sisi lain, liabilitas juga melampaui anggaran yang ditetapkan dengan total capaian sebesar 109,02%. Hal ini dipengaruhi oleh liabilitas jangka pendek yang mencapai 135,05% dari target serta liabilitas jangka panjang sebesar 102,45%. Pendapatan operasi menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan realisasi sebesar Rp36,73 triliun atau 109,24% dari target RKAP 2025. Kinerja pendapatan tersebut secara langsung

1,422,887,719 GT, a 1.42% increase compared equivalent to 1,402,921,700 GT in 2024. The realized container traffic in boxes in 2025 was 14,875,783 boxes, a 4.04% increase compared to 14,298,480 boxes in 2024. Similarly, container traffic in TEUs increased by 5.20%, from 18,807,089 TEUs in 2024 to 19,785,539 TEUs in 2025.

Actual passenger traffic in 2025 was 20,434,569 people, a 5.10% increase compared to 19,443,897 people in the previous year. For other services, operational production in 2025 reached 4,048,169 tons, a 4.22% increase compared to 3,884,222 tons in 2024. The realized electricity production in 2025, measured in kilowatt-hours (KWH), reached 47,691,326 kWh, a 6.93% increase compared to the 2024 realization of 44,599,514 kWh. Overall, the 2025 performance achievement was due to the strategies established in 2025.

COMPARISON BETWEEN ACHIEVED RESULTS AND TARGET RESULTS

By implementing the aforementioned business strategies, the Company achieved a strong performance in 2025. This was evident in the achievement of its 2025 targets. Ship traffic in units in 2025 reached 112.08% of the RKAP target. While, the GT unit achieved the RKAP target of 100.30%. Container traffic in boxes in the 2025 RKAP reached 103.82%, while in terms of TEUs, it reached 105.19%. Non-container cargo traffic in tons in 2025 reached 102.02% above the RKAP target. Non-container cargo traffic in units exceeded the RKAP target by 107.56%. The non-containerized goods traffic in MMBTU reached 15,943,575 MMBTU, or 118.58% of the 2025 budget. The livestock traffic reached 787,682 individuals, or 122.07% of the 2025 budget. While passengers traffic reached 20,434,569 individuals, or 103.17% of the 2025 budget.

Pelindo's assets demonstrated a performance that exceeded targets, with total realization reaching Rp126.05 trillion, or 103.03% of the 2025 RKAP, due to current assets reaching 114.20% and non-current assets reaching 101.00%. While, liabilities also exceeded the set budget, reaching a total of 109.02%, due to short-term liabilities reaching 135.05% of the target, and long-term liabilities reaching 102.45%. Operating revenue demonstrated excellent performance, reaching Rp36.73 trillion, or 109.24% of the 2025 RKAP target. This revenue performance directly drove operating profit growth of 104.49% and current year profit growth of 108.60% of

mendorong capaian laba usaha yang sebesar 104,49% dan capaian laba tahun berjalan sebesar 108,60% dari target, yang menunjukkan bahwa Pelindo mampu menjaga profitabilitas di atas rencana yang telah ditetapkan.

KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DAN LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIANNYA

Berbagai capaian positif yang diperoleh di tahun 2025 tidak lepas dari kemampuan Perseroan dalam menghadapi berbagai kendala. Kendala-kendala tersebut antara lain, pengembangan layanan di segmen logistik, *hinterland*, dan properti yang belum berkembang. Untuk mengembangkan segmen logistik, Perseroan memiliki strategi dengan meningkatkan kerjasama dengan pelaku industri logistik penting untuk memperluas jaringan logistik guna meningkatkan daya saing pelabuhan, mengurangi biaya logistik, dan meningkatkan reliabilitas layanan. Untuk mengembangkan segmen *hinterland*, Perseroan memiliki strategi dengan mengembangkan konektivitas multimoda bertujuan untuk mengintegrasikan pelabuhan dengan kawasan *hinterland*, yang berpotensi mendorong peningkatan volume kargo yang keluar-masuk pelabuhan, mengurangi biaya transportasi, dan mempercepat pergerakan kargo, sehingga berdampak pada peningkatan kinerja komersial perusahaan serta efisiensi biaya dan operasional. Pengembangan kawasan industri di area pelabuhan juga berpotensi mendorong peningkatan *throughput* dan menciptakan kepastian pasar bagi pelabuhan terkait. Selanjutnya, pengembangan pelabuhan di kawasan industri dilakukan untuk memfasilitasi integrasi layanan guna meminimalkan waktu dan biaya transportasi serta meningkatkan daya tarik kawasan industri. Untuk mengembangkan segmen properti, Perseroan memiliki strategi dengan melakukan MOU/perjanjian kerjasama baru dan perpanjangan kerjasama dengan berbagai pihak.

Kendala lainnya yaitu, penguasaan pangsa pasar nonpetikemas masih rendah (11%) jika dibandingkan dengan *player* BUMN dan swasta lainnya yang dapat mengoperasikan TUKS/Tersus. Untuk mengatasi kendala tersebut, Perseroan memiliki strategi yaitu mengembangkan layanan operasi TUKS dengan bekerjasama dengan BUMN dan swasta serta pengembangan layanan operasi pelabuhan milik Kementerian Perhubungan. Perseroan juga melakukan pengembangan potensi pelabuhan melalui kerjasama dengan *strategic partners* dan eksplorasi kerjasama untuk pengembangan international *transhipment hub*. Selain itu Perseroan juga akan bekerjasama dengan pelaku bisnis pelayaran domestik dan kerjasama antar pelabuhan untuk optimalisasi konsep *hub and spoke* dengan integrasi data.

the target, demonstrating Pelindo's ability to maintain profitability above its set targets.

CHALLENGES FACED BY THE COMPANY AND STEPS TO RESOLVE THEM

The positive achievements achieved in 2025 are thanks to the Company's ability to overcome obstacles, including underdeveloped service development in the logistics, hinterland, and property segments. To develop the logistics segment, the Company instigated a strategy of increasing collaboration with key logistics industry players to expand the logistics network to enhance port competitiveness, reduce logistics costs, and improve service reliability. To develop the hinterland segment, the Company's strategy for developing multimodal connectivity was aimed at integrating ports with hinterland areas. This has the potential to increase cargo volume entering and leaving ports, reduce transportation costs, and accelerate cargo movement, thereby improving the Company's commercial performance and cost and operational efficiency. The development of industrial estates in port areas also has the potential to increase traffic and create market certainty for the ports concerned. Also, port development within industrial estates is being carried out to facilitate service integration to minimize transportation time and costs and increase the attractiveness of industrial areas. To develop the property segment, the Company has a strategy related to entering into new MOUs/cooperation agreements and extending existing partnerships with other parties.

Another obstacle is the Company's low non-container market share (11%) compared to other BUMN and private sector players that operate TUKS/Tersus. To address this challenge, the Company has a strategy for developing TUKS operational services by collaborating with BUMN and private sector companies, as well as developing port operational services under the Ministry of Transportation. The Company is also developing port potential through collaborations with strategic partners and exploring collaborations to develop international transshipment hubs. Also, the Company will collaborate with domestic shipping businesses and inter-port cooperation to optimize the hub and spoke concept using data integration.

ANALISIS PROSPEK USAHA

Pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2026 diproyeksikan melambat secara moderat menjadi sekitar 3,1% menurut International Monetary Fund, dipengaruhi oleh ketidakpastian geopolitik, tekanan inflasi, dan dampak pengetatan kebijakan moneter di negara maju. Kondisi ini mendorong kenaikan biaya pembiayaan, melemahnya investasi, serta terbatasnya ekspansi perdagangan global. Dalam jangka menengah, situasi tersebut berpotensi meningkatkan volatilitas pasar keuangan, menekan arus investasi ke negara berkembang, serta memengaruhi stabilitas harga komoditas dan kinerja ekspor, sehingga memerlukan kewaspadaan terhadap berbagai risiko eksternal.

Di tengah dinamika ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian tersebut, prospek perekonomian Indonesia pada tahun 2026 tetap menunjukkan arah yang positif dengan mengandalkan kekuatan permintaan domestik sebagai penopang utama pertumbuhan. Pemerintah Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2026 berada pada kisaran 5,2%–5,8%, sebagaimana ditetapkan dalam asumsi dasar ekonomi makro oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai landasan penyusunan RAPBN 2026. Proyeksi tersebut mencerminkan optimisme terhadap ketahanan ekonomi nasional dalam merespons tekanan eksternal. Sementara itu, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menetapkan target pertumbuhan yang lebih optimistis dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026, yaitu pada kisaran 5,8%–6,3%, sebagai bagian dari strategi percepatan transformasi ekonomi dan peningkatan produktivitas sektor-sektor strategis.

Sejalan dengan dinamika ekonomi global dan nasional, sektor kepelabuhanan dan logistik terus beradaptasi melalui sejumlah tren utama. Pertama, perluasan cakupan bisnis (global/*regional coverage*) melalui integrasi horizontal untuk memperkuat jaringan pelabuhan dan meningkatkan efisiensi. Kedua, integrasi kawasan industri (*industrial zone integration*) melalui pendekatan vertikal yang menghubungkan pelabuhan dengan layanan logistik, transportasi multimoda, dan kawasan hinterland. Ketiga, penerapan *operational excellence* yang berfokus pada peningkatan produktivitas, optimalisasi aset, serta digitalisasi operasional, termasuk pengembangan *smart ports* berbasis teknologi seperti *IoT* dan *data analytics*. Sejalan dengan tren tersebut, Pelindo terus memperkuat digitalisasi melalui sistem terintegrasi yang mencakup seluruh rantai operasional guna meningkatkan efisiensi, kecepatan layanan, serta transparansi operasional.

Untuk menghadapi tahun 2026, Pelindo melakukan analisis secara internal untuk mengidentifikasi peluang-peluang usaha yang dapat dicapai dengan berbekal keunggulan yang dimiliki. Pelindo memiliki beberapa kekuatan internal yang dapat dijadikan landasan untuk mengembangkan

BUSINESS PROSPECT ANALYSIS

Global economic growth in 2026 are projected to slow moderately to around 3.1%, according to the International Monetary Fund, influenced by geopolitical uncertainty, inflationary pressures, and the impact of monetary policy tightening in developed countries. This condition has led to increased financing costs, weakened investment, and limited global trade expansion. In the medium term, this situation has the potential to increase financial market volatility, suppress investment flows to developing countries, and impact commodity price stability and export performance, necessitating vigilance against external risks.

During the uncertain global economic dynamics, Indonesia's economic outlook for 2026 remains positive, relying on a strong domestic demand as the primary driver of growth. The Indonesian government projects national economic growth in 2026 to be in the range of 5.2%–5.8%, as stipulated in the basic macroeconomic assumptions set by the Republic of Indonesia Ministry of Finance as the basis for preparing the 2026 Draft State Budget (RAPBN). This projection reflects optimism regarding the resilience of the national economy in responding to external pressures. While, the Ministry of National Development Planning/Bappenas has set a more optimistic growth target in the 2026 Government Work Plan (RKP), namely in the range of 5.8%–6.3%, as part of its strategy to accelerate economic transformation and increase productivity in strategic sectors.

In line with global and national economic dynamics, the port and logistics sector continues to adapt through several key trends. First, expanding business coverage (global/regional coverage) through horizontal integration to strengthen port networks and increase efficiency. Second, industrial zone integration through a vertical approach that connects ports with logistics services, multimodal transportation, and hinterland areas. Third, the implementation of operational excellence, which focuses on increasing productivity, optimizing assets, and digitizing operations, including the development of technology-based smart ports using IoT and data analytics. In line with these trends, Pelindo continues to strengthen its digitalization through an integrated system that covers the entire operational chain to improve efficiency, service speed, and operational transparency.

To prepare for 2026, Pelindo conducted an internal analysis to identify potential business opportunities leveraging its existing strengths. Pelindo has several internal strengths that serve as a foundation for developing its port business in Indonesia, such as a diversified portfolio, dominance of

bisnis pelabuhan di Indonesia, seperti portofolio yang terdiversifikasi, menguasai pasar petikemas di Indonesia, dan memiliki lokasi yang strategis untuk dijadikan transshipment hub. Namun, untuk dapat melakukan perencanaan strategi dan mencapai sasaran Pelindo tahun 2026-2030, Perseroan tidak cukup mengandalkan kekuatan internalnya saja tetapi juga mengkalkulasi faktor eksternal yang menjadi ancaman sekaligus peluang yang dapat dioptimalkan guna keberlangsungan Perseroan. Perseroan melakukan analisis yang mencakup lingkungan internal Perseroan dan menghasilkan *strengths* (kekuatan) dan *weaknesses* (kelemahan), sedangkan analisis eksternal akan menghasilkan *opportunities* (peluang) dan *threats* (ancaman).

Dengan memanfaatkan kekuatan (*strengths*) yang dimiliki, Pelindo optimis dapat meraih prospek cerah di masa mendatang serta siap menghadapi berbagai peluang yang mendukung keberlanjutan dan ekspansi bisnisnya. Seiring dengan hal ini Pelindo juga yakin dapat memanfaatkan potensi pertumbuhan di tahun 2026. Adapun peluang (*opportunity*) yang dimiliki Pelindo pada tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Program Pemerintah yang sejalan dengan peningkatan konektivitas logistik.
   a. Terdapat 211 proyek strategis nasional yang didalamnya mencakup pengembangan sektor pelabuhan dan kawasan yang bertujuan untuk menurunkan biaya logistik
   b. Adanya peraturan hilirisasi industri berdasarkan UU No. 3 tahun 2020
2. Pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan mencapai angka 5,6%-6,1% hingga tahun 2029.
3. Terdapat potensi penguatan layanan kepelabuhanan yang terintegrasi melalui sinergi dengan klaster BUMN logistik.
4. Terdapat potensi perluasan jaringan baru layanan petikemas ke wilayah Asia yang telah menguasai 55% market share petikemas global.
5. Potensi kerjasama dengan mitra usaha strategis nasional dan global dalam penyediaan layanan kepelabuhanan.

Prospek usaha yang baik tersebut tidak terlepas dari dukungan berbagai keunggulan internal, seperti struktur organisasi yang efisien, penguasaan pasar domestik, kapabilitas sumber daya manusia, serta dukungan teknologi dan sistem logistik yang terus berkembang. Dengan kombinasi antara potensi internal dan peluang eksternal yang dimiliki, Perseroan berada dalam posisi yang strategis untuk merespon dinamika industri dan mewujudkan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Sepanjang tahun 2025, Pelindo terus menunjukkan penguatan yang signifikan dalam penerapan *Corporate Governance* sebagai bagian integral dari transformasi dan pengelolaan bisnis yang berkelanjutan. Perseroan

the Indonesian container market, and a strategic location for transshipment hubs. However, to strategically plan and achieve Pelindo's 2026-2030 targets, the Company must not rely solely on its internal strengths but also consider external factors that pose both threats and opportunities that can be optimized for its sustainability. The Company conducted an SWOT analysis covering its internal environment, showing its strengths and weaknesses, followed by its opportunities and threats.

By leveraging its strengths, Pelindo is optimistic about achieving bright future prospects and is ready to embrace opportunities that support its business sustainability and expansion. Pelindo is also confident it can capitalize on growth potential in 2026. Pelindo's opportunities in 2026 include:

1. Government programs aligned with improving logistics connectivity.
   a. 211 national strategic projects, including the development of the port sector and regions aimed at reducing logistics costs.
   b. Regulations on industrial downstreaming based on Law No. 3 of 2020.
2. National economic growth targeted to reach 5.6%-6.1% by 2029.
3. Potential for strengthening integrated port services through synergy with BUMN logistics clusters.
4. Potential for expanding the new container service network to the Asian region, which already controls 55% of the global container market share.
5. Potential for collaborating with national and global strategic business partners in providing port services.

These positive business prospects are supported by internal strengths, such as an efficient organizational structure, domestic market dominance, human capital capabilities, and continuously evolving technology and logistics systems. With this combination of internal potential and external opportunities, the Company is strategically positioned to respond to industry dynamics and achieve sustainable business growth.

DEVELOPMENT OF CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

Throughout 2025, Pelindo continued to demonstrate significant strengthening in the of Corporate Governance implementation as an integral part of its transformation and sustainable business management. The Company

secara konsisten melakukan penyempurnaan kebijakan dan kerangka tata kelola guna memastikan keselarasan dengan praktik terbaik, dinamika regulasi, serta kebutuhan organisasi pasca integrasi. Penerapan prinsip-prinsip *Corporate Governance* sangat diperlukan, agar Perseroan menjadi lebih tangguh dan mampu bertahan dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. Dalam rangka meningkatkan penerapan tata kelola secara berkelanjutan, Perseroan senantiasa menerapkan keempat pilar GCG yaitu ETAK (Perilaku Beretika, Transparansi, Akuntabilitas dan Keberlanjutan).

consistently refined its governance policies and framework to ensure alignment with best practices, regulatory dynamics, and post-integration organizational needs. The application of Corporate Governance principles is essential for the Company to become more resilient and able to survive in the face of increasingly fierce competition. To enhance the sustainable governance implementation, the Company consistently applies the four pillars of GCG: ETAK (Ethical Behavior, Transparency, Accountability, and Sustainability).

Pelindo secara konsisten menempatkan perilaku beretika sebagai landasan utama dalam menjalankan seluruh aktivitas usaha. Perilaku beretika di lingkungan Pelindo diwujudkan melalui implementasi Kode Etik Perusahaan dan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) yang berlaku bagi seluruh insan Perseroan, mulai dari jajaran Direksi, manajemen, hingga karyawan di seluruh lini operasional. Selain itu, Perseroan memperkuat mekanisme pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) yang memberikan ruang bagi seluruh pihak untuk melaporkan dugaan pelanggaran secara aman, rahasia, dan independen. Setiap laporan yang diterima ditindaklanjuti secara objektif dan profesional sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui penerapan perilaku beretika yang konsisten, Pelindo berkomitmen untuk menciptakan budaya kerja yang berintegritas, menjaga kepercayaan pemangku kepentingan, serta mendukung keberlanjutan usaha Perseroan dalam jangka panjang.

Pelindo consistently places ethical behavior as the primary foundation in carrying out all its business activities. Ethical behavior within Pelindo is realized through the Company's Code of Ethics and Code of Conduct, which apply to all Company personnel, from the Board of Directors and management to employees across all operational lines. Also, the Company has strengthened its whistleblowing system, which provides a place for all parties to report suspected violations safely, confidentially, and independently. Every report received is followed up objectively and professionally in accordance with applicable regulations. Through a consistent ethical behavior, Pelindo is committed to creating a work culture of integrity, maintaining stakeholder trust, and supporting the Company's long-term business sustainability.

Terkait dengan transparansi, Pelindo menerapkan keterbukaan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Informasi mengenai kinerja keuangan, operasional, rencana strategis, hingga aspek keberlanjutan secara berkala disampaikan melalui berbagai kanal, antara lain laporan tahunan, laporan keberlanjutan, situs web resmi, dan forum komunikasi pemangku kepentingan. Selain itu, Pelindo mengembangkan budaya keterbukaan di lingkungan internal perusahaan dengan mendorong komunikasi dua arah, pengelolaan data yang andal, serta transparansi dalam pelaporan kinerja individu maupun unit kerja. Dalam menjalankan proses pengadaan barang dan jasa, Pelindo menerapkan prinsip transparansi melalui sistem berbasis teknologi informasi yang memungkinkan proses yang terbuka, akuntabel, dan dapat diawasi secara *real-time*. Ini menjadi bagian penting dalam mencegah konflik kepentingan serta menjaga integritas bisnis perusahaan.

For transparency, Pelindo applies accurate, relevant, and timely information disclosure to all internal and external stakeholders. Information related to financial performance, operations, strategic plans, and sustainability aspects is regularly communicated through a number of channels, including annual reports, sustainability reports, the official website, and stakeholder communication forums. Also, Pelindo fosters a culture of openness within the Company by encouraging two-way communication, reliable data management, and transparency in individual and work unit performance reporting. When carrying out the goods and procurement process services, Pelindo applies the principle of transparency through an information technology-based system that enables an open, accountable process that can be monitored in real time. This is crucial for preventing conflicts of interest and maintaining the Company's business integrity.

Terkait dengan akuntabilitas, Pelindo senantiasa menerapkan prinsip akuntabilitas sebagai pilar utama dalam pengelolaan perusahaan guna memastikan setiap keputusan dan tindakan bisnis dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan terukur. Penerapan akuntabilitas diwujudkan melalui sistem manajemen kinerja yang terintegrasi, dengan penetapan indikator kinerja utama (KPI) yang selaras dengan strategi Perseroan serta pemantauan dan evaluasi secara berkala

For accountability, Pelindo applies this principle as a key pillar in Company management to ensure all business decisions and actions can be accounted for in a transparent and measurable manner. This accountability is realized through an integrated performance management system, and the key performance indicators (KPIs) aligned with the Company's strategy, and regular monitoring and evaluation of their achievement. Pelindo also ensures that every strategic program and initiative is implemented in

terhadap pencapaiannya. Pelindo juga memastikan bahwa setiap program dan inisiatif strategis dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan, serta dilaporkan secara transparan kepada pemangku kepentingan.

accordance with the established work plan and budget, and is transparently reported to stakeholders.

Direksi secara berkala melaporkan pencapaian kinerja dan pelaksanaan program strategis kepada Dewan Komisaris dan pemegang saham, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan Perseroan. Selain itu, mekanisme audit internal dan eksternal juga dijalankan secara rutin untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan Perseroan berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan kepatuhan terhadap regulasi. Pelindo juga mengintegrasikan prinsip akuntabilitas dalam sistem manajemen risiko, pengendalian internal, serta pengelolaan keuangan perusahaan secara transparan dan efisien. Pelaporan keuangan disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku dan diaudit oleh auditor independen guna memastikan validitas dan keandalannya.

The Board of Directors regularly reports on performance achievements and the implementation of strategic programs to the Board of Commissioners and shareholders, as a form of accountability for the Company's management. Also, internal and external audit mechanisms are routinely used to ensure all Company activities are conducted in accordance with the principles of accountability and regulatory compliance. Pelindo also integrates accountability principles into its risk management system, internal controls, and financial management in a transparent and efficient manner. Financial reporting is prepared in accordance with applicable accounting standards and audited by independent auditors to ensure its validity and reliability.

Sejalan dengan penerapan akintabilitas, Perseroan juga mengimplementasikan *Internal Control over Financial Reporting* (ICOFR) yang dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas ketentuan dalam SK-5/DKU.MBU/11/2024 yang mengatur penerapan sistem pengendalian internal yang memadai dan terintegrasi, khususnya dalam mendukung keandalan pelaporan keuangan. Pada tahun 2025, implementasi ICOFR dilakukan pada entitas Pelindo *Holding* serta 12 entitas afiliasi. Pendekatan ini dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kompleksitas operasional dan kesiapan masing-masing entitas, sehingga diharapkan penerapan ICOFR dapat berjalan efektif, konsisten, dan memberikan nilai tambah dalam peningkatan kualitas pengendalian internal serta transparansi pelaporan keuangan di lingkungan Pelindo.

In line with this accountability, the Company has also established Internal Control over Financial Reporting (ICOFR), as a follow-up to the provisions in SK-5/DKU. MBU/11/2024, which regulates the implementation of an adequate and integrated internal control system, particularly to support the reliability of financial reporting. In 2025, ICOFR was being carried out at Pelindo Holding and 12 affiliated entities. This approach is being implemented in stages, taking into account the operational complexity and readiness of each entity. It is hoped that ICOFR will be effective, consistent, and provide added value in improving the quality of internal control and transparency of financial reporting within Pelindo.

Terkait dengan keberlanjutan, Pelindo berkomitmen untuk mengintegrasikan prinsip keberlanjutan (*sustainability*) dalam seluruh aspek operasional dan pengembangan bisnisnya. Pilar keberlanjutan di Pelindo dijalankan melalui keseimbangan antara tiga aspek utama yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial. Di bidang ekonomi, Pelindo terus mengembangkan layanan kepelabuhanan yang efisien dan berdaya saing global, serta memastikan keberlanjutan finansial Perseroan dan kontribusi terhadap pendapatan negara. Dalam aspek lingkungan, Pelindo menerapkan berbagai inisiatif ramah lingkungan seperti pengelolaan limbah dan emisi, peningkatan efisiensi energi, serta pengembangan pelabuhan hijau (*green port*). Perseroan juga aktif dalam program rehabilitasi lingkungan pesisir dan konservasi keanekaragaman hayati di sekitar wilayah operasionalnya. Dari sisi sosial, Pelindo menjalankan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat, pendidikan, kesehatan, dan pengembangan UMKM. Selain itu, Pelindo berkomitmen menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, aman, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

For sustainability, Pelindo is committed to integrating sustainability principles into all aspects of its operations and business development. Pelindo's sustainability pillars are implemented with a balance between three main aspects: economic, environmental, and social. In the economic aspect, Pelindo continues to develop efficient and globally competitive port services, while ensuring the Company's financial sustainability and contribution to state revenues. In the environmental aspect, Pelindo implements eco-friendly initiatives such as waste and emissions management, increased energy efficiency, and the development of green ports. The Company is also active in coastal environmental rehabilitation and biodiversity conservation programs around its operational areas. For the social aspect, Pelindo has implemented a Social and Environmental Responsibility (SER) program that focuses on community empowerment, education, health, and MSME development. Also, Pelindo is committed to creating an inclusive, safe work environment that upholds human rights.

Sebagai wujud transparansi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi Perusahaan Pelindo, serta sebagai tindak lanjut ketentuan yang tercantum pada Peraturan Menteri BUMN PER-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN, Pelindo membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi yang berada di bawah organ Dewan Komisaris. Pelindo juga menerbitkan Laporan Tata Kelola Terintegrasi yang tercantum dalam Laporan Manajemen Perseroan.

Sebagai pengendali group perusahaan, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) memiliki kapasitas untuk mengawasi dan melakukan koordinasi di segala lini bisnis Perusahaan. Sinergi positif antara Pelindo dengan Anak Perusahaan diharapkan dapat mendukung upaya terwujudnya Pelindo sebagai Indonesia *Maritime Gateway*. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut di atas, diperlukan peran serta Pelindo untuk mengarahkan dan mengawasi Anak Perusahaan agar dalam pengelolaan setiap Anak Perusahaan agar sejalan dengan kebijakan strategis Pelindo guna mendorong penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik pada klasifikasi risiko Konglomerasi.

PENILAIAN KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Dalam melaksanakan tugas kepengurusannya, Direksi dibantu oleh 2 (dua) Komite di bawah Direksi, yang terdiri dari Komite Pelindo Bersih dan Komite Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan. Prosedur penilaian kinerja Komite di bawah Direksi dilakukan oleh Direksi secara periodik dengan kriteria penilaian kinerja Komite di bawah Direksi berdasarkan rapat dan pelaksanaan tugas yang telah dijalankan selama tahun buku. Sepanjang tahun 2025, Direksi menilai bahwa Komite di bawah Direksi tersebut telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, serta sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan pada Surat Keputusan Direksi.

PERUBAHAN KOMPOSISI ANGGOTA DIREKSI

Selama tahun 2025, terdapat perubahan komposisi Direksi. Perubahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan Pemegang Saham sebagaimana penjelasan berikut:

KOMPOSISI DIREKSI PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) PERIODE 1 JANUARI 2025 – 7 MARET 2025

Komposisi Direksi periode 1 Januari 2025 sampai dengan 7 Maret 2025 berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Wakil Direktur Utama dan 5 (lima) orang Direktur sebagai berikut:

To demonstrate transparency in the Integrated Governance implementation in the Pelindo Conglomerate, and as a follow-up to the provisions stipulated in the Minister of BUMN Regulation PER-02/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of BUMN, Pelindo has established an Integrated Governance Committee under the Board of Commissioners. Pelindo also publishes an Integrated Governance Report, which is included in the Company's Management Report.

As the controlling shareholder of the group, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) has the capacity to supervise and coordinate all of the Company's business lines. Positive synergy between Pelindo and its subsidiaries is expected to support Pelindo's efforts to establish itself as Indonesia's Maritime Gateway. To achieve this, Pelindo's involvement is required to direct and supervise its subsidiaries, ensuring the management of each subsidiary aligns with Pelindo's strategic policies and encourages the implementation of good corporate governance within the conglomerate's risk classification.

ASSESSMENT OF COMMITTEES BELOW THE BOARD OF DIRECTORS

When carrying out its management duties, the Board of Directors is assisted by two committees, the Pelindo Bersih Committee and the Governance, Risk Management, and Compliance Committee. The performance assessment procedures for the committees below the Board of Directors are conducted periodically by the Board of Directors, with the criteria for assessing their performance is based on meetings and the implementation of duties carried out during the fiscal year. For 2025, the Board of Directors assessed that the committees below the Board of Directors had carried out their duties and responsibilities effectively and in accordance with the duties and responsibilities stipulated in the Board of Directors' Decree.

CHANGES IN THE BOARD OF DIRECTORS' COMPOSITION

During 2025, there were changes to the Board of Directors composition, which were implemented in accordance with the needs of Shareholders, as explained below:

PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) BOARD OF DIRECTORS COMPOSITION FOR THE PERIOD JANUARY 1, 2025 – MARCH 7, 2025

The Board of Directors composition for the period January 1, 2025, to March 7, 2025, consisted of 7 (seven) members, including 1 (one) President Director, 1 (one) Deputy President Director, and 5 (five) Directors, as follows:

Arif Suhartono	:	Direktur Utama President Director
Hambra	:	Wakil Direktur Utama Vice President Director
Mega Satria	:	Direktur Keuangan Finance Director
Ihsanuddin Usman	:	Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum HC and General Affairs Director
Prasetyo	:	Direktur Strategi Strategy Director
Boy Robyanto	:	Direktur Investasi Investment Director
Putut Sri Muljanto	:	Direktur Pengelola Managing Director

KOMPOSISI DIREKSI PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) PERIODE 7 MARET 2025 – 25 JUNI 2025

Berdasarkan Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia Nomor: SK-51/MBU/03/2025 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia pada tanggal 7 Maret 2025, memutuskan untuk mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Ihsanuddin Usman sebagai Direktur SDM dan Umum dan mengangkat Ihsanuddin Usman sebagai Direktur SDM dan Umum. Dengan demikian, komposisi Direksi periode 7 Maret 2025 sampai dengan 25 Juni 2025 berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Wakil Direktur Utama dan 5 (lima) orang Direktur sebagai berikut:

PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) BOARD OF DIRECTORS COMPOSITION FOR THE PERIOD MARCH 7, 2025 – JUNE 25, 2025

Based on a copy of the Minister of BUMN Decree, as the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. SK-51/MBU/03/2025 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) on March 7, 2025, the Board of Directors agreed to confirm the honorable dismissal of Ihsanuddin Usman as Human Resources and General Affairs Director and appoint Ihsanuddin Usman as Human Resources and General Affairs Director. As a result, the Board of Directors composition for the period from March 7, 2025, to June 25, 2025, consisted of 7 (seven) members: 1 (one) President Director, 1 (one) Vice President Director, and 5 (five) Directors as follows:

Arif Suhartono	:	Direktur Utama President Director
Hambra	:	Wakil Direktur Utama Vice President Director
Mega Satria	:	Direktur Keuangan Finance Director
Ihsanuddin Usman	:	Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum HC and General Affairs Director
Prasetyo	:	Direktur Strategi Strategy Director
Boy Robyanto	:	Direktur Investasi Investment Director
Putut Sri Muljanto	:	Direktur Pengelola Managing Director

KOMPOSISI DIREKSI PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) PERIODE 25 JUNI 2025 – 19 SEPTEMBER 2025

Berdasarkan Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danantara Asset Management Selaku Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia Nomor: SK-168/MBU/06/2025, Nomor: SK.024/DI-DAM/DO/2025 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia pada tanggal 25 Juni 2025, memutuskan:

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Ihsanuddin Usman sebagai Direktur SDM dan Umum.
2. Memberhentikan dengan hormat Prasetyo sebagai Direktur Strategi.
3. Mengangkat Dwi Fatan Lilyana sebagai Direktur SDM dan Umum serta Drajat Sulistyo sebagai Direktur Strategi.

Dengan demikian, komposisi Direksi periode 25 Juni 2025 sampai dengan 19 September 2025 berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Wakil Direktur Utama dan 5 (lima) orang Direktur sebagai berikut:

PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) BOARD OF DIRECTORS COMPOSITION FOR THE PERIOD JUNE 25, 2025 - SEPTEMBER 19, 2025

Based on a copy of the Minister of BUMN Decree, as the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. SK-168/MBU/06/2025 and No. SK.024/DI-DAM/DO/2025 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero), dated June 25, 2025, the following was decided to:

1. Confirm the honorable dismissal of Ihsanuddin Usman as Human Resources and General Affairs Director.
2. Honorably dismiss Prasetyo as Strategy Director.
3. Appoint Dwi Fatan Lilyana as Human Resources and General Affairs Directorand Drajat Sulistyo as Strategy Director.

As a result, the Board of Directors composition for the period from June 25, 2025, to September 19, 2025, consisted of 7 (seven) members: 1 (one) President Director, 1 (one) Vice President Director, and 5 (five) Directors as follows:

Arif Suhartono	:	Direktur Utama President Director
Hambra	:	Wakil Direktur Utama Vice President Director
Mega Satria*	:	Direktur Keuangan Finance Director
Boy Robyanto	:	Direktur Investasi Investment Director
Putut Sri Muljanto	:	Direktur Pengelola Finance Director
Dwi Fatan Lilyana	:	Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum HC and General Affairs Director
Drajat Sulistyo	:	Direktur Strategi Strategy Director

*Bahwa sehubungan telah diangkatnya Sdr. Mega Satria sebagai Direktur Keuangan PT Pertamina Patra Niaga pada tanggal 4 Juli 2025, maka perlu mengukuhkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Direktur Keuangan Pelindo.
*In connection with the appointment of Mega Satria as Finance Director of PT Pertamina Patra Niaga on July 4, 2025, it was necessary to confirm his dismissal as Finance Director of Pelindo.

KOMPOSISI DIREKSI PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) PERIODE 19 SEPTEMBER 2025 – 20 FEBRUARI 2026

Berdasarkan Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danantara Asset Management Selaku Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia Nomor: SK-264/MBU/09/2025, Nomor: SK.059/DI-DAM/DO/2025 Tentang Pemberhentian,

PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) BOARD OF DIRECTORS COMPOSITION FOR THE PERIOD SEPTEMBER 19, 2025 – FEBRUARY 20, 2026

Based on a copy of the Minister of BUMN Decree, as the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. SK-264/MBU/09/2025 and No. SK.059/DI-DAM/DO/2025 concerning the Dismissal, Change of Position Nomenclature, Transfer of Duties, and Appointment of Members of the Board of Directors

Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia pada tanggal 19 September 2025, memutuskan:

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Mega Satria sebagai Direktur Keuangan.
2. Memberhentikan dengan hormat Hambra sebagai Wakil Direktur Utama.
   Mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi sebagai berikut:

of PT Pelabuhan Indonesia, dated September 19, 2025, the following was decided to:

1. Confirm the honorable dismissal of Mega Satria as Finance Director.
2. Honorably dismiss Hambra as Vice President Director.

   Change the nomenclature of positions for members of the Board of Directors as follows:

No.	Semula Formerly	Menjadi To Become
1	Wakil Direktur Utama Vice President Director	-
2	Direktur Strategi Strategy Director	Direktur Komersial Commercial Director
3	Direktur Pengelola Managing Director	Direktur Operasi Operations Director
4	Direktur Investasi Investment Director	Direktur Pengembangan Usaha Business Development Director
5	-	Direktur Manajemen Risiko Risk Management Director
6	-	Direktur Teknik Engineering Director

3. Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi:

3. To assign the following as members of the Board of Directors:

No.	Nama Name	Semula Formerly	Menjadi To Become
1	Putut Sri Mulyanto	Direktur Pengelola Managing Director	Direktur Operasi Operations Director
2	Boy Robyanto	Direktur Investasi Investment Director	Direktur Manajemen Risiko Risk Management Director
3	Drajat Sulistyo	Direktur Strategi Strategy Director	Direktur Komersial Commercial Director

4. Mengangkat Bachtiar Soeria Atmadja sebagai Direktur Keuangan, Hosadi Apriza Putra sebagai Direktur Pengembangan Usaha, serta Muhammad Suriawan Wakan sebagai Direktur Teknik.

   Dengan demikian, komposisi Direksi periode 19 September 2025 sampai dengan saat ini berjumlah 8 (delapan) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, dan 7 (tujuh) orang Direktur sebagai berikut:

4. Appointed Bachtiar Soeria Atmadja as Finance Director, Hosadi Apriza Putra as Business Development Director, and Muhammad Suriawan Wakan as Engineering Director.

   Thus, the composition of the Board of Directors for the period from September 19, 2025, to the present, consists of 8 (eight) members, consisting of 1 (one) President Director and 7 (seven) Directors, as follows:

Arif Suhartono	:	Direktur Utama President Director
Boy Robyanto	:	Direktur Manajemen Risiko Vice President Director
Putut Sri Muljanto	:	Direktur Operasi Director of Operations

Dwi Fatan Lilyana	:	Direktur SDM dan Umum Human Resources and General Affairs Director
Drajat Sulistyo	:	Direktur Komersial Commercial Director
Bachtiar Soeria Atmadja	:	Direktur Keuangan Director of Finance
Hosadi Apriza Putra	:	Direktur Pengembangan Usaha Director of Business Development
Muhammad Suriawan Wakan	:	Direktur Pengelola Director of Engineering

KOMPOSISI DIREKSI PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) PERIODE 20 FEBRUARI 2026 – SAAT INI

Berdasarkan Salinan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia Nomor: 131 Tahun 2026 Nomor: SK-058/DI-DAM/DO/2026 Tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia pada tanggal 20 Februari 2026, memutuskan:

1. Mengukuhkan pemberhentian Hosadi Apriza Putra sebagai Direktur Pengembangan Usaha.
2. Memberhentikan dengan hormat Arif Suhartono sebagai Direktur Utama dan Putut Sri Mulyanto sebagai Direktur Operasi.
3. Mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi yaitu Wakil Direktur Utama dan Direktur Hubungan Kelembagaan.
4. Mengalihkan penugasan Drajat Sulistyo yang semula sebagai Direktur Komersial menjadi Wakil Direktur Utama.
5. Mengangkat Achmad Muchtasyar sebagai Direktur Utama, Farid Padang sebagai Direktur Komersial, Prasetyo sebagai Direktur Pengembangan Usaha, Hendri Ginting sebagai Direktur Hubungan Kelembagaan, serta Prasetyadi sebagai Direktur Operasi.

   Dengan demikian, komposisi Direksi periode 20 Februari 2026 sampai dengan saat ini berjumlah 8 (delapan) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, dan 7 (tujuh) orang Direktur sebagai berikut:

COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS OF PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) FOR THE PERIOD OF FEBRUARY 20, 2026 – PRESENT

Based on a copy of the Shareholders' Resolution of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Number: 131 of 2026, Number: SK-058/DI-DAM/DO/2026 Concerning On February 20, 2026, the Dismissal, Change of Position Nomenclature, Transfer of Duties, and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) decided:

1. Confirming the dismissal of Hosadi Apriza Putra as Director of Business Development.
2. Honorably dismissing Arif Suhartono as President Director and Putut Sri Mulyanto as Director of Operations.
3. Changing the position nomenclature of members of the Board of Directors to Deputy President Director and Director of Institutional Relations.
4. Reassigning Drajat Sulistyo from Commercial Director to Deputy President Director.
5. Appointing Achmad Muchtasyar as President Director, Farid Padang as Commercial Director, Prasetyo as Director of Business Development, Hendri Ginting as Director of Institutional Relations, and Prasetyadi as Director of Operations.

Thus, the Board of Directors for the period from February 20, 2026, to the present, consists of eight members, consisting of one President Director and seven Directors, as follows:

Achmad Muchtasyar	:	Direktur Utama President Director
Drajat Sulistyo	:	Wakil Direktur Utama Vice President Director
Boy Robyanto	:	Direktur Manajemen Risiko Risk Management Director
Dwi Fatan Lilyana	:	Direktur SDM dan Umum Human Resources and General Affairs Director
Bachtiar Soeria Atmadja	:	Direktur Keuangan Finance Director
Muhammad Suriawan Wakan	:	Direktur Teknik Engineering Director

Farid Padang	:	Direktur Komersial Commercial Affairs Director
Prasetyo	:	Direktur Pengembangan Usaha Business Development Director
Hendri Ginting	:	Direktur Hubungan Kelembagaan Institutional Relations Director
Prasetyadi	:	Direktur Operasi Operations Director

PENUTUP

Keberhasilan yang diraih sepanjang tahun 2025 tidak terlepas dari dukungan penuh pemegang saham, kerja sama mitra usaha, serta dedikasi seluruh insan Pelindo. Direksi menyampaikan apresiasi atas kontribusi seluruh pihak yang telah berperan dalam menjaga momentum pertumbuhan Perseroan. Memasuki tahun 2026, Pelindo akan terus memperkuat posisi sebagai penyedia layanan kepelabuhanan dan logistik terintegrasi kelas dunia dengan mengedepankan inovasi, digitalisasi, serta peningkatan kualitas layanan. Perseroan optimis dapat terus menciptakan nilai tambah bagi pemangku kepentingan serta berkontribusi nyata dalam mendorong daya saing ekonomi nasional.

Akhir kata, Direksi menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Pelindo. Dengan semangat kolaborasi dan transformasi berkelanjutan, Perseroan siap melangkah lebih maju dalam menghadapi tantangan dan meraih peluang di masa depan.

CLOSING

The success achieved throughout 2025 was thanks to the full support of the shareholders, the cooperation of business partners, and the dedication of all Pelindo employees. The Board of Directors would like to express its appreciation for the contributions of all parties who played a role in maintaining the Company's growth momentum. As we enter 2026, Pelindo will continue to strengthen its position as a world-class integrated port and logistics service provider by prioritizing innovation, digitalization, and service quality improvements. The Company is optimistic that it will continue to create added value for stakeholders and make a significant contribution to boosting national economic competitiveness.

In closing, the Board of Directors would like to express its gratitude for the trust placed in Pelindo. With this spirit of collaboration and continuous transformation, the Company is ready to move forward in facing challenges and seizing future opportunities.

Jakarta, 29 April 2026
Jakarta, April 29, 2026

Atas Nama Direksi | On Behalf of the Board of Directors

Achmad Muchtasyar
Direktur Utama
President Director

PELINDO
INDONESIA MARITIME GATEWAY

Laporan Dewan Komisaris
Board of Commissioners' Report

Agus Suhartono
Komisaris Utama/Independen
President/Independent Commissioner

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang terhormat,

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Pelindo dapat melalui tahun 2025 dengan kinerja yang terjaga dan arah transformasi yang semakin solid di tengah dinamika industri maritim dan kepelabuhanan. Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam melanjutkan transformasi pasca integrasi, khususnya dalam aspek standarisasi operasional, optimalisasi jaringan pelabuhan, dan penguatan fondasi organisasi.

\Pada kesempatan ini, Dewan Komisaris akan menyampaikan laporan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sepanjang tahun 2025. Dalam laporan ini akan kami sampaikan antara lain penilaian kinerja Direksi, pandangan atas prospek usaha yang disusun Direksi, pandangan atas penerapan tata kelola perusahaan, serta susunan dan perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris. Berikut kami sampaikan laporan pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris terhadap jalannya kepengurusan Perseroan untuk tahun buku 2025.

PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris secara konsisten melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan strategi dan kinerja Perusahaan, memberikan arahan dan nasihat kepada Direksi, serta memastikan bahwa seluruh kegiatan usaha dilaksanakan sesuai dengan prinsip *Corporate Governance*. Dalam memberikan penilaian atas kinerja Direksi, Dewan Komisaris mempertimbangkan beberapa aspek sebagai dasar penilaiannya. Aspek tersebut antara lain, kondisi perekonomian, capaian kinerja yaitu kinerja operasional, kinerja keuangan dan tingkat kesehatan perusahaan.

FREKUENSI DAN CARA PEMBERIAN NASIHAT KEPADA ANGGOTA DIREKSI

Pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dilaksanakan melalui beberapa kegiatan utama, yaitu rapat internal Dewan Komisaris untuk pengambilan keputusan kolegial. Bila diperlukan, dapat dilakukan melalui rapat internal Dewan Komisaris mengundang Direksi terkait untuk memberikan penjelasan atau tambahan data/informasi atas permasalahan atau usulan yang perlu mendapat rekomendasi persetujuan Dewan Komisaris. Kegiatan pengawasan juga dilakukan kunjungan ke Cabang Pelabuhan PT Pelabuhan Indonesia (Persero), sehingga

Dear Shareholders and Stakeholders,

With gratitude to God Almighty for His abundant grace and blessings, Pelindo navigated 2025 with a maintained performance and an increasingly solid transformation path amidst the dynamics of the maritime and port industry. For 2025, the Board of Commissioners has assessed that the Board of Directors demonstrated a strong commitment to continuing the post-integration transformation, particularly in the areas of operational standardization, port network optimization, and strengthening the organizational foundation.

On this occasion, the Board of Commissioners would like submit its report on its supervisory and advisory performance to the Board of Directors throughout 2025. This report will include an assessment of the Board of Directors' performance, an outlook on the business prospects prepared by the Board of Directors, an outlook on the good corporate governance implementation, and the composition and changes in the Board of Commissioners. Below, we present the Board of Commissioners' supervisory and advisory report on the Company's management for the 2025 fiscal year.

BOARD OF DIRECTORS' PERFORMANCE ASSESSMENT

When carrying out its supervisory function, the Board of Commissioners consistently monitors the application of the Company's strategies and performance, provides direction and advice to the Board of Directors, and ensures that all business activities are conducted in accordance with Corporate Governance principles. When assessing the Board of Directors' performance, the Board of Commissioners considers several aspects as the basis for its assessment, which includes economic conditions, performance achievements, operational performance, financial performance, and the Company's health level.

FREQUENCY AND METHODS OF PROVIDING ADVICE TO THE BOARD OF DIRECTORS

Supervision and advice to the Board of Directors is carried out through internal Board of Commissioners meetings for collegial decision-making. If necessary, internal meetings of the Board of Commissioners may be held, inviting relevant Directors to provide explanations or additional data/information on issues or proposals requiring Board of Commissioners approval. Supervisory activities also includes visits to PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Port Branches, providing the Board of Commissioners with a clearer picture of the issues faced by the Branches

Dewan Komisaris mendapatkan gambaran secara lebih jelas atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Cabang dalam memberikan jasa kepelabuhanan maupun masalah terkait lainnya. Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris telah melaksanakan Rapat Internal sebanyak 21 (dua puluh satu) kali.

when providing port services and other related matters. Throughout 2025, the Board of Commissioners held 21 (twenty-one) Internal Meetings.

Di samping itu, dalam menjalankan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dilakukan dengan melaksanakan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi. Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris telah melaksanakan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi sebanyak 12 (dua belas) kali.

In addition, the Board of Directors conducted its supervision and provided advice through Joint Meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors. In 2025, the Board of Commissioners held 12 (twelve) Joint Meetings with the Board of Directors.

PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS DALAM PERUMUSAN DAN IMPLEMENTASI STRATEGI YANG DILAKUKAN OLEH DIREKSI

Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan secara aktif dan independen dalam memastikan bahwa proses perumusan dan implementasi strategi yang dilakukan Direksi berjalan selaras dengan kepentingan jangka panjang Perseroan, prinsip *corporate governance*, serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pengawasan terhadap perumusan strategi, Dewan Komisaris memberikan arahan dan pandangan strategis melalui forum rapat bersama Direksi, dengan menelaah kelayakan asumsi, keselarasan dengan visi dan misi Perseroan, serta kesesuaian dengan arah kebijakan pemegang saham dan prioritas pembangunan nasional.

Pengawasan dalam implementasi strategi, dilakukan Dewan Komisaris melalui pengawasan secara berkelanjutan melalui evaluasi kinerja Direksi berbasis indikator yang terukur, pemantauan atas realisasi rencana kerja dan anggaran, serta penelaahan laporan manajemen secara periodik. Dewan Komisaris juga memastikan bahwa pelaksanaan strategi didukung oleh sistem manajemen risiko yang memadai, pengendalian internal yang efektif, serta praktik keberlanjutan yang terintegrasi dalam operasional Perseroan.

Selain itu, Dewan Komisaris, melalui komite-komite di bawah Dewan Komisaris, melakukan pendalaman terhadap aspek-aspek krusial seperti kinerja keuangan, efektivitas investasi, kepatuhan, dan pengelolaan risiko. Hasil pengawasan tersebut menjadi dasar dalam memberikan rekomendasi konstruktif kepada Direksi guna meningkatkan kualitas eksekusi strategi dan memastikan respons yang adaptif terhadap dinamika lingkungan usaha.

BOARD OF COMMISSIONERS' SUPERVISION OF STRATEGY FORMULATION AND IMPLEMENTATION BY THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Commissioners actively and independently exercises its supervisory function to ensure that the strategy formulation and implementation process undertaken by the Board of Directors aligns with the Company's long-term interests, corporate governance principles, and applicable laws and regulations. When supervising the strategy formulation, the Board of Commissioners provides strategic direction and insights through joint meetings with the Board of Directors, reviewing the feasibility of assumptions, alignment with the Company's vision and mission, and compliance with shareholder policy directives and national development priorities.

Supervision of strategy implementation is carried out by the Board of Commissioners through ongoing measurable indicator-based evaluations of the Board of Directors' performance, monitoring of work plans and budget implementation, and periodic reviews of management reports. The Board of Commissioners also ensures that strategy implementation is supported by an adequate risk management system, effective internal controls, and integrated sustainability practices within the Company's operations.

In addition, the Board of Commissioners, through its committees, conducts in-depth reviews of crucial aspects such as financial performance, investment effectiveness, compliance, and risk management, with the results serving as the basis for providing constructive recommendations to the Board of Directors to improve the quality of strategy execution and ensure an adaptive response to the dynamics of the business environment.

KONDISI PEREKONOMIAN YANG SECARA LANGSUNG BERDAMPAK TERHADAP KINERJA PERSEROAN

Pemulihan ekonomi global pada tahun 2025 menunjukkan momentum yang semakin stabil setelah periode panjang pengendalian inflasi. Mayoritas bank sentral utama berhasil mencapai pendaratan lunak (*soft landing*),

ECONOMIC CONDITIONS THAT DIRECTLY IMPACT THE COMPANY'S PERFORMANCE

The global economic recovery in 2025 showed increasingly stable momentum after a prolonged period of controlled inflation. Most major central banks achieved a soft landing, with global GDP growth at around 3.3% and inflation

dengan pertumbuhan PDB global tercatat di kisaran 3,3% dan inflasi yang mulai menurun mendekati target 2%, sehingga membuka ruang bagi pelonggaran kebijakan moneter secara bertahap. Meski demikian, pertumbuhan tersebut masih berlangsung tidak merata, di mana Amerika Serikat tetap solid didorong konsumsi domestik dengan pertumbuhan sekitar 2,1%, sementara kawasan Eropa mencatat pertumbuhan lebih rendah sebesar 1,4% akibat tekanan biaya energi dan dampak kebijakan perdagangan. Di sisi lain, China mencatat pertumbuhan sebesar 5,0%, meningkat dari 4,8% pada tahun sebelumnya, yang didorong oleh kinerja kuat sektor manufaktur dan ekspor, khususnya kendaraan listrik dan energi surya, meskipun tetap menghadapi tantangan struktural dan dinamika kebijakan global. Sejalan dengan itu, perdagangan internasional pada tahun 2025 menunjukkan akselerasi yang melampaui pertumbuhan ekonomi global, dengan nilai perdagangan diproyeksikan melampaui USD35 triliun atau meningkat lebih dari USD2,2 triliun (sekitar 7%) dibandingkan tahun 2024, mencerminkan kembali menguatnya momentum perdagangan lintas negara.

beginning to decline nearer the 2% target, opening up room for gradual monetary policy easing. However, this growth remains uneven, with the United States remaining solid, driven by domestic consumption, growing at around 2.1%, while the European region recorded lower growth of 1.4% due to pressures on energy costs and the impact of trade policies. While, China recorded growth of 5.0%, up from 4.8% the previous year, driven by strong performance in the manufacturing and export sectors, particularly for electric vehicles and solar energy, despite continuing to face structural challenges and global policy dynamics. Accordingly, international trade in 2025 accelerated beyond global economic growth, with trade value projected to exceed USD 35 trillion, an increase of more than USD 2.2 trillion (approximately 7%) compared to 2024, reflecting the renewed momentum of cross-border trade.

Sejalan dengan stabilnya pemulihan ekonomi global, perekonomian Indonesia pada tahun 2025 turut menunjukkan kinerja yang positif dengan mencatat pertumbuhan sebesar 5,11%, lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2024 sebesar 5,03%. Dari sisi produksi, lapangan usaha jasa lainnya mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 9,93%, sementara dari sisi pengeluaran, komponen ekspor barang dan jasa tumbuh paling tinggi sebesar 7,03%. Pertumbuhan tersebut terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha, kecuali sektor penggalian dan pertambangan yang mengalami kontraksi sebesar 0,66%.

In line with the stable global economic recovery, the Indonesian economy also showed positive performance in 2025, recording growth of 5.11%, higher than the 5.03% achieved in 2024. From the production side, other services sectors recorded the highest growth at 9.93%, while from the expenditure side, the export component of goods and services grew the highest at 7.03%. This growth occurred across almost all business sectors, except for the quarrying and mining sector, which contracted by 0.66%.

Dari perspektif industri kepelabuhanan, kinerja global pada tahun 2025 tetap menunjukkan tren positif seiring pertumbuhan ekonomi dunia yang mencapai sekitar USD117,2 triliun, meningkat dari USD111,1 triliun pada tahun 2024 dan berada dalam jalur ekspansi jangka menengah sekitar 4% per tahun. Namun demikian, pertumbuhan tersebut tidak sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan volume peti kemas, tercermin dari penurunan multiplier TEUs terhadap PDB yang berada di bawah satu kali. Kondisi ini dipengaruhi oleh kebijakan proteksionisme, dampak lanjutan pandemi COVID-19, serta ketegangan geopolitik yang menekan arus perdagangan global. Di Indonesia, arus nonpetikemas mencatat pertumbuhan yang stabil namun moderat dengan CAGR sekitar 5,2% pada periode 2020–2024, didominasi oleh curah kering berbasis komoditas sumber daya alam, sementara segmen lain relatif stagnan atau menurun. Secara keseluruhan, dinamika industri pelabuhan nasional, khususnya pada segmen nonpetikemas, sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi domestik dan global, termasuk ketidakpastian eksternal dan perubahan kebijakan perdagangan yang berdampak pada aktivitas ekspor-impor dan volume logistik.

From a port industry perspective, global performance in 2025 continued to show a positive trend, as global economic growth reached approximately USD 117.2 trillion, up from USD 111.1 trillion in 2024, on a medium-term expansion path of approximately 4% per year. However, this growth was not being fully proportional to the increase in container volume, as reflected in the decline in the TEU multiplier to GDP, which was below one. This situation due to protectionist policies, the ongoing impact of the COVID-19 pandemic, and geopolitical tensions that put pressure on global trade traffic. In Indonesia, non-containerized traffic recorded stable but moderate growth with a CAGR of around 5.2% in the 2020–2024 period, dominated by natural resource-based dry bulk, while other segments remained relatively stagnant or declined. Overall, the dynamics of the national port industry, particularly in the non-containerized segment, were heavily influenced by domestic and global economic conditions, including external uncertainty and changes in trade policies that impacted export-import activities and logistics volumes.

KINERJA PERSEROAN

Di tengah kondisi perekonomian dan industri pelabuhan tersebut, Dewan Komisaris memandang Direksi telah mampu menghadapi tantangan dan peluang yang terjadi dengan mencatatkan kinerja yang baik di tahun 2025. Pada tahun 2025, Perseroan berhasil mencatatkan kinerja operasional yang baik. Dari sisi operasional kepelabuhan, realisasi arus kapal dalam satuan Unit tahun 2025 mencapai 369.813 Unit, meningkat 16,07% dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 318.623 Unit. Demikian pula dengan realisasi arus kapal dalam satuan GT tahun 2025 sebesar 1.422.887.719 GT, meningkat 1,42% dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 1.402.921.700 GT. Realisasi arus petikemas dalam satuan Box tahun 2025 sebesar 14.875.783 Box, meningkat 4,04% dibandingkan tahun 2024 sebesar 14.298.480 Box. Demikian pula dengan arus petikemas dalam satuan TEUs yang meningkat sebesar 5,20%, dari 18.807.089 TEUs di tahun 2024 menjadi 19.785.539 TEUs di tahun 2025. Realisasi arus penumpang pada tahun 2025 sebesar 20.434.569 Orang, meningkat 5,10% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 19.443.897 Orang.

Selain kinerja operasional, Perseroan juga telah mencatatkan kinerja keuangan yang baik. Pendapatan operasi tahun 2025 mencapai Rp36,73 triliun, meningkat 5,44% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai Rp34,83 triliun. Laba tahun berjalan tahun 2025 sebesar Rp4,36 triliun, meningkat 14,73% dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp3,80 triliun. Total aset tahun 2025 mencapai Rp126,05 triliun, menurun sebesar 1,14% dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp127,51 triliun.

Dewan Komisaris juga mengapresiasi berbagai inisiatif strategis yang dilakukan Direksi dalam meningkatkan kinerja operasional dan kualitas layanan, termasuk pengembangan ekosistem digital yang mendukung transparansi dan efisiensi proses bisnis. Upaya tersebut dinilai telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan daya saing Perseroan serta memperkuat perannya dalam mendukung kelancaran arus logistik nasional.

Selain kinerja operasional dan keuangan, tingkat kesehatan Perseroan juga menjadi salah satu pertimbangan Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian atas kinerja Direksi. Peringkat (*rating*) yang disampaikan dalam rangka penilaian tingkat kesehatan adalah pemeringkatan yang dilakukan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) yang ditandatangani pada tanggal 14 April 2025 dengan hasil sebagai berikut:

1. Peringkat Berdiri Sendiri (*Stand Alone Rating*): idAA+(sa)
2. Peringkat Akhir (*Final Rating*): idAAA/*Stable*

Dengan demikian, Tingkat Kesehatan untuk PT Pelabuhan Indonesia (Persero) pada Tahun Buku 2025 adalah Sangat Sehat (AAA) sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri

COMPANY PERFORMANCE

Amidst these economic and port industry conditions, the Board of Commissioners believes the Board of Directors were able to address the challenges and opportunities and recorded a strong performance in 2025, by successfully delivering a strong operational performance. From a port operational perspective, vessel traffic in units in 2025 reached 369,813 units, a 16.07% increase compared to 318,623 units in 2024. Similarly, vessel traffic in GT in 2025 reached 1,422,887,719 GT, a 1.42% increase compared to 1,402,921,700 GT in 2024. The container traffic in box units in 2025 was 14,875,783 boxes, a 4.04% increase compared to 14,298,480 boxes in 2024. Similarly, the container traffic in TEUs increased by 5.20%, from 18,807,089 TEUs in 2024 to 19,785,539 TEUs in 2025. The passenger traffic in 2025 was 20,434,569 people, a 5.10% increase compared to 19,443,897 people the previous year.

In addition to operational performance, the Company has also recorded a strong financial performance. Operating revenue in 2025 reached Rp36.73 trillion, a 5.44% increase compared to Rp34.83 trillion in 2024. Profit for the year in 2025 reached Rp4.36 trillion, a 14.73% increase compared to Rp3.80 trillion in 2024. Total assets in 2025 reached Rp126.05 trillion, a 1.14% decrease compared to Rp127.51 trillion in 2024.

The Board of Commissioners appreciates the strategic initiatives undertaken by the Board of Directors to improve operational performance and service quality, including the development of a digital ecosystem that supports transparency and efficiency in business processes. These efforts are considered to have made a positive contribution to increasing the Company's competitiveness and strengthening its role in supporting the smooth flow of national logistics.

In addition to the operational and financial performance, the Company's health is also a consideration for the Board of Commissioners when assessing the Board of Directors' performance. The rating submitted for the health assessment is the rating issued by PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), signed on April 14, 2025, with the following results:

1. Stand-Alone Rating: idAA+(sa)
2. Final Rating: idAAA/Stable

Therefore, the Health Rating for PT Pelabuhan Indonesia (Persero) for the 2025 Fiscal Year was Very Healthy (AAA), as stipulated in Ministerial Regulation No. Per-2/

nomor Per-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA YANG DISUSUN DIREKSI

Pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan melambat moderat ke sekitar 3,1%, dipengaruhi ketidakpastian geopolitik, tekanan inflasi, dan pengetatan kebijakan moneter di negara maju. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya biaya pembiayaan, melemahnya investasi, serta terbatasnya ekspansi perdagangan global, sekaligus meningkatkan volatilitas pasar keuangan dan menekan arus investasi ke negara berkembang.

Di tengah tekanan global, ekonomi Indonesia tetap menunjukkan prospek positif dengan pertumbuhan diperkirakan pada kisaran 5,2%–5,8% (Kementerian Keuangan) dan hingga 5,8%–6,3% (Bappenas). Pertumbuhan didorong oleh konsumsi domestik, investasi, dan belanja pemerintah pada sektor prioritas seperti infrastruktur, pangan, energi, dan industri pengolahan. Namun, tantangan eksternal dan kebutuhan pembiayaan tetap perlu diantisipasi melalui sinergi kebijakan dan penguatan sektor produktif.

Sejalan dengan dinamika global, industri pelabuhan dan logistik terus berkembang melalui tiga tren utama, yaitu perluasan jaringan (global/*regional coverage*) melalui integrasi horizontal untuk meningkatkan efisiensi dan memperkuat konektivitas, integrasi kawasan industri (*industrial zone integration*) melalui pendekatan vertikal yang menghubungkan pelabuhan dengan layanan logistik, transportasi multimoda, dan kawasan hinterland, serta penerapan *operational excellence* yang didukung digitalisasi, termasuk pengembangan *smart ports* berbasis teknologi seperti IoT dan *data analytics* untuk meningkatkan produktivitas dan optimalisasi aset. Sejalan dengan tren tersebut, Pelindo turut memperkuat transformasi digital melalui implementasi sistem operasional terintegrasi end-to-end guna meningkatkan efisiensi, kecepatan layanan, serta transparansi operasional.

Berdasarkan prediksi kondisi perekonomian dan industri pelabuhan serta kekuatan internal Perseroan, Dewan Komisaris berpendapat bahwa prospek usaha yang telah disusun oleh Direksi sudah tepat. Dewan Komisaris berkeyakinan bahwa Perseroan akan dapat memanfaatkan peluang yang ada di antaranya adalah Program Pemerintah yang sejalan dengan peningkatan konektivitas logistik serta terdapat potensi penguatan layanan kepelabuhanan yang terintegrasi melalui sinergi dengan klaster BUMN logistik. Kemudian, terdapat potensi perluasan jaringan baru layanan petikemas ke wilayah Asia yang telah menguasai 55% *market share* petikemas global. Selain itu, Perseroan memiliki peluang potensi kerjasama dengan mitra usaha strategis nasional dan global dalam penyediaan layanan kepelabuhanan.

MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of BUMN.

OPINION ON BUSINESS PROSPECTS BY THE BOARD OF DIRECTORS

Global economic growth was projected to slow moderately to around 3.1%, influenced by geopolitical uncertainty, inflationary pressures, and tightening monetary policy in developed countries. This condition resulted in rising financing costs, weakening investment, and limited global trade expansion, while increasing financial market volatility and suppressing investment traffic to developing countries.

Despite the global pressures, the Indonesian economy continued to show positive prospects, with growth estimated in the range of 5.2%–5.8% (Ministry of Finance), and up to 5.8%–6.3% (Bappenas). Growth is driven by domestic consumption, investment, and government spending in priority sectors such as infrastructure, food, energy, and the manufacturing industry. However, external challenges and financing needs still need to be anticipated through policy synergy and strengthening the productive sector.

In line with the global dynamics, the port and logistics industry continues to evolve through three key trends: network expansion (global/regional coverage), with horizontal integration to increase efficiency and strengthen connectivity; industrial zone integration with a vertical approach connecting ports with logistics services, multimodal transportation, and hinterland areas; and the implementation of operational excellence supported by digitalization, including the development of technology-based smart ports such as IoT and data analytics to increase productivity and asset optimization. In line with these trends, Pelindo is also strengthening its digital transformation through the integrated end-to-end operational system to improve efficiency, service speed, and operational transparency.

Based on the economic and port industry conditions forecasts, as well as the Company's internal strengths, the Board of Commissioners believes that the business prospects outlined by the Board of Directors are appropriate. The Board of Commissioners is confident that the Company will be able to capitalize on existing opportunities, including government programs that align with increased logistics connectivity and the potential for strengthening integrated port services through synergies with BUMN logistics clusters. Also, there is potential for expanding a new container service network to the Asian region, which already controls 55% of the global container market share, and the Company has potential collaboration opportunities with strategic national and global business partners for providing port services.

PANDANGAN ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dewan Komisaris menilai bahwa penerapan *Corporate Governance* di Pelindo telah berjalan secara konsisten dan menunjukkan penguatan yang positif seiring dengan transformasi Perseroan. Dewan Komisaris juga memandang bahwa upaya Perseroan dalam memperkuat sistem pengendalian internal, manajemen risiko, serta fungsi pengawasan internal telah berjalan efektif dalam mendukung tercapainya kinerja yang sehat dan berkelanjutan. Seluruh langkah tersebut dinilai sejalan dengan upaya transformasi dan integrasi pelabuhan nasional yang sedang dijalankan oleh Pelindo pasca merger. Dewan Komisaris akan terus menjalankan perannya secara aktif dan independen dalam memastikan penerapan GCG berlangsung secara optimal demi mendukung pencapaian kinerja yang berkelanjutan dan menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

VIEW ON THE IMPLEMENTATION OF CORPORATE GOVERNANCE

The Board of Commissioners has assessed that the Corporate Governance implementation in Pelindo has been consistent and has shown positive improvement in line with the Company's transformation. Also, the Board of Commissioners' view is that the Company's efforts to strengthen its internal control system, risk management, and internal oversight function have been effective in supporting the achievement of healthy and sustainable performance. All of these steps are considered in line with Pelindo's ongoing national port transformation and integration efforts post-merger. The Board of Commissioners will continue to actively and independently carry out its role in ensuring optimal GCG implementation to support the achievement of sustainable performance and create added value for all stakeholders.

SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Manajemen risiko merupakan salah satu elemen penting dalam menjalankan bisnis perusahaan karena semakin berkembangnya dunia perusahaan serta meningkatnya kompleksitas aktivitas perusahaan mengakibatkan meningkatnya tingkat eksposur risiko yang dihadapi perusahaan. Sasaran utama dari implementasi manajemen risiko adalah melindungi dan menciptakan nilai perusahaan. Perusahaan mengelola risiko dengan menyeimbangkan antara strategi bisnis dengan pengelolaan risikonya sehingga perusahaan akan mendapatan hasil optimal dari operasionalnya.

RISK MANAGEMENT SYSTEM

Risk management is a crucial element when running the Company's business. The ever-evolving business environment and increasing complexity of its activities result in increased risk exposure. The primary goal of implementing risk management is to protect and create corporate value. The Company manages risks by balancing its business strategies with risk management to achieve optimal results from its operations.

Perseroan melakukan asesmen Indeks Kematangan Risiko (*Risk Maturity Index*) dengan menggunakan 2 (dua) penilaian aspek dimensi, yakni:

1. Aspek Dimensi seperti Budaya dan Kapabilitas Risiko, Organisasi dan Tata Kelola, Kerangka Risiko dan Kepatuhan, Dimensi Proses dan Kontrol Risiko, dan Model, Data, dan Teknologi Risiko.
2. Aspek Kinerja meliputi Tingkat Kesehatan Peringkat Akhir (*Final Rating*) dan Peringkat Komposit Risiko.

The Company conducts a Risk Maturity Index assessment using two dimensions:

1. Dimensional aspects including Risk Culture and Capabilities, Organization and Governance, Risk and Compliance Framework, Risk Process and Control Dimensions, and Risk Models, Data, and Technology.
2. Performance aspects including the Final Rating and Composite Risk Rating.

Tingkat maturitas manajemen risiko yang dilakukan pada Pelindo tahun buku 2024 dan dievaluasi pada tahun 2025 dengan memperoleh nilai 3,15 dalam kategori Fase Praktik yang Baik menggambarkan pencapaian yang signifikan dalam pengelolaan risiko perusahaan. Penilaian ini menunjukkan pelaksanaan sistem manajemen risiko yang diterapkan Perseroan sudah sesuai dengan standar yang diharapkan dalam pengelolaan risiko.

Pelindo's risk management maturity level for the 2024 fiscal year, evaluated in 2025, with a score of 3.15 in the Good Practices Phase, demonstrates significant achievements in the Company's risk management. This assessment demonstrates that the Company's risk management system meets the expected standards in risk management.

Dewan Komisaris Perusahaan memiliki organ pendukung yakni Komite *Good Corporate Governance* dan Pemantau Manajemen Risiko yang bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas satuan kerja Manajemen Risiko guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris dan Direksi berpandangan bahwa sistem manajemen risiko tahun 2025 telah berjalan

The Company's Board of Commissioners has supporting bodies, namely the Good Corporate Governance Committee and the Risk Management Monitoring Committee, tasked with monitoring and evaluating the Risk Management work unit's duties and providing recommendations to the Board of Commissioners. The Board of Commissioners and the Board of Directors

memadai. Hal ini berdasarkan bawah Grup Manajemen Risiko Kantor Pusat secara periodik selalu melakukan pertemuan dengan Komite GCG dan PMR dalam rangka melakukan koordinasi terkait rencana dan monitoring proses implementasi Manajemen Risiko Perusahaan. Hasil koordinasi dituangkan dalam bentuk notulen rapat untuk selanjutnya dapat ditindaklanjuti oleh Grup Manajemen Risiko. Koordinasi yang secara rutin setiap bulan telah dilakukan dengan Komite GCG dan PMR di tahun 2025. Adapun topik yang dibahas dalam koordinasi tersebut diantaranya meliputi Usulan Profil Risiko RKAP, Hasil *Monitoring* Profil Risiko Bulanan, dan hal-hal lainnya yang menjadi perhatian Direksi dan Komisaris.

are of the opinion that the risk management system in 2025 functioned adequately. This was due to the Head Office Risk Management Group's regular meetings with the GCG Committee and the Risk Management Monitoring Committee to coordinate plans and monitor the implementation of the Company's Risk Management. The results of these meetings were recorded in meeting minutes for further action by the Risk Management Group. Routine monthly coordination with the GCG Committee and the Risk Management Monitoring Committee was conducted throughout 2025. Topics discussed during these coordination meetings included the proposed RKAP Risk Profile, monthly Risk Profile Monitoring Results, and other matters of concern to the Board of Directors and Board of Commissioners.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Sistem Pengendalian Internal merupakan aspek yang sangat penting dalam penerapan GCG, karena dapat mendorong Perseroan menjadi lebih transparan, akuntabel, responsibel, mandiri, adil, dan terpercaya. Sistem Pengendalian Internal yang efektif dan andal mampu memberikan keyakinan bagi para *stakeholder* bahwa seluruh sumber daya yang dimiliki dapat dikelola dengan baik dalam rangka mencapai tujuan Perseroan. Terselenggaranya Sistem Pengendalian Internal yang andal dan efektif di Perseroan menjadi tanggung jawab dari Manajemen Perseroan. Guna mendukung pengembangan Sistem Pengendalian Internal di Perseroan.

Tujuan dari penyelenggaraan sistem pengendalian internal di Perseroan adalah:

1. Efisiensi dan Efektivitas Operasional yang dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya Perseroan dalam rangka mencapai tujuan Perseroan.
2. Keandalan Pelaporan yang dimaksudkan untuk menjamin laporan yang akurat, wajar, tepat waktu, dan relevan, sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Penyajian dan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan dan operasional lebih terjamin dengan adanya pengendalian intern yang efektif. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan bahwa seluruh data yang diolah adalah transaksi yang sah dan telah mendapat otorisasi, serta seluruh transaksi telah dicatat pada tanggal terjadinya dengan nilai yang akurat.
3. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa semua kegiatan Perseroan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau pihak berwenang lainnya, maupun kebijakan, ketentuan, dan prosedur yang ditetapkan oleh Perseroan.

INTERNAL CONTROL SYSTEM

The Internal Control System is a crucial aspect of GCG implementation, as it encourages the Company to be more transparent, accountable, responsible, independent, fair, and trustworthy. An effective and reliable Internal Control System provides stakeholders with confidence that all available resources are being managed effectively to achieve the Company's objectives. The instigation of a reliable and effective Internal Control System within the Company is the responsibility of the Company's Management. This system supports the development of the Company's Internal Control System.

The objectives of implementing an internal control system in the Company includes:

1. Operational Efficiency and Effectiveness, which aims to improve the effectiveness and efficiency of managing the Company's resources in order to achieve its objectives.
2. Reporting Reliability, which aims to ensure accurate, fair, timely, and relevant reports, as a basis for sound and accountable decision-making. The presentation and disclosure of information in financial and operational reports is more secure with effective internal controls. This is intended to provide assurance that all processed data is legitimate and authorized, and that all transactions are recorded on the date they occur with accurate values.
3. Compliance with Laws and Regulations, which aims to ensure that all Company activities are carried out in accordance with applicable laws and regulations, including those issued by the government or other authorized parties, as well as the policies, provisions, and procedures established by the Company.

Sistem Pengendalian Internal Perseroan telah mengacu ke *Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission* (COSO) sebagai kerangka kerja yang komprehensif untuk mengukur efektivitas pengendalian internal terdiri dari 5 (lima) komponen, yaitu:
1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*);
2. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*);
3. Kegiatan Pengendalian (*Control Activites*);
4. Informasi dan Komunikasi (*Information & Communication*);
5. Pemantauan dan Evaluasi (*Monitoring*).

Pelindo secara rutin mengevaluasi efektivitas Sistem Pengendalian Internal. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai reliabilitas Sistem Pengendalian Internal Perseroan serta konsistensi implementasinya. Evaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal telah dilaksanakan pada tahun 2025 oleh pihak eksternal yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangungan (BPKP) berdasarkan Surat Tugas Direktur Pengawasan Badan Usaha Konektivitas dan Pariwisata Nomor PE.12.02/ST-205/D502/1/2025 tanggal 21 November 2025, melalui pendekatan Quality Assurance Review (QAR) untuk tahun buku 2024.

Penilaian Kualitas SPI/*Quality Assurance Review* (QAR) Korporasi pada SPI PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Tahun 2025 dilaksanakan dengan ruang lingkup mencakup Penilaian Kesesuaian terhadap Standar (*Conformity*) dan Penilaian Maturitas SPI Korporasi (*Maturity*). Hasil penilaian kesesuaian terhadap standar (*conformity*) menunjukkan bahwa fungsi audit intern PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Tahun Buku 2024 yang dilaksanakan pada tahun 2025 telah berada pada fase Pencapaian Umum. Hasil penilaian Maturitas SPI Korporasi (*Maturity*) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) menunjukan nilai 2,93.

Hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Satuan Pengawasan Inten selanjutnya disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk telaah dan *monitoring* atas pelaksanaan sistem pengendalian internal Perseroan. Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian internal Perseroan pada tahun 2025, Direksi dan Dewan Komisaris menyatakan bahwa sistem pengendalian internal secara keseluruhan telah berjalan memadai.

WHISTLEBLOWING SYSTEM

Whistleblowing system (WBS) atau yang disebut Pelindo Bersih diperkenalkan untuk memperkuat penerapan dalam rangka memberikan kesempatan kepada seluruh insan Pelindo dan *stakeholders* lainnya untuk dapat menyampaikan laporan mengenai indikasi pelanggaran terhadap nilai–nilai etika yang berlaku, berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggung-jawabkan serta dengan niat baik. Pelindo menyediakan aplikasi/sistem untuk melaporkan tindakan curang, korupsi, dan pemerasan bagi seluruh *stakeholder* yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang dilakukan oleh insan Pelindo, cabang pelabuhan, dan

The Company's Internal Control System adheres to the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) as a comprehensive framework for measuring the effectiveness of internal control. It comprises five components:
1. Control Environment;
2. Risk Assessment;
3. Control Activities;
4. Information and Communication;
5. Monitoring and Evaluation.

Pelindo regularly evaluates the effectiveness of its Internal Control System to assess its reliability and the consistency of its implementation. The internal control system evaluation was conducted in 2025 by an external party, the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP), based on the Task Force Letter of the Director of Supervision of Connectivity and Tourism Business Entities No. PE.12.02/ST-205/D502/1/2025 dated November 21, 2025, using a Quality Assurance Review (QAR) approach for the 2024 fiscal year.

The 2025 Corporate Internal Audit Quality Assurance Review (QAR) of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) was conducted with a scope that included a Conformity Assessment and a Maturity Assessment of the Corporate Internal Audit System. The results of the conformity assessment indicate that the internal audit function of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) for Fiscal Year 2024, implemented in 2025, has reached the General Achievement stage. The Corporate Internal Audit Maturity assessment of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) showed a score of 2.93.

The evaluation results conducted by the Internal Audit Unit were then submitted to the Board of Directors and Board of Commissioners for review and monitoring the implementation of the Company's internal control system. Based on the evaluation results of the Company's internal control system implementation in 2025, the Board of Directors and Board of Commissioners stated that the overall internal control system was functioning adequately.

WHISTLEBLOWING SYSTEM

A Whistleblowing System (WBS), known as Pelindo Bersih, was introduced to strengthen implementation and provide an opportunity for all Pelindo employees and other stakeholders to report any indications of violations of applicable ethical values, based on credible evidence and in good faith. Pelindo provides an application/system for reporting fraud, corruption, and extortion for all stakeholders who have information and wish to report any suspected violations committed by Pelindo employees, port branches, and group companies through an independent system. Through this system, Pelindo can become a better company and be more competitive

grup perusahaan melalui sistem yang independen. Melalui sistem ini, Pelindo dapat menjadi perseroan yang lebih baik dan mempunyai daya saing baik di tingkat nasional dan internasional. Bagi insan Pelindo atau *stakeholder* yang melaporkan akan diberikan perlindungan, baik dalam hal kerahasiaan identitas maupun dari kemungkinan tindakan balasan oleh si terlapor.

both nationally and internationally. Pelindo employees or stakeholders who report will be protected, both in terms of identity confidentiality and from potential retaliation by the reported party.

Perseroan menjamin kerahasiaan identitas pelapor, kecuali apabila pengungkapan tersebut diperlukan dalam kaitan dengan laporan atau penyidikan yang dilakukan oleh pihak berwajib. Pelaporan yang dilakukan tanpa identitas akan tetap di proses, namun demikian akan dipertimbangkan terlebih dahulu kesungguhan isi laporan, kredibilitas, dan bukti-bukti yang diajukan, serta kemungkinan untuk melakukan konfirmasi pelaporan. Perseroan menjamin terhadap pelapor dari segala tuntutan hukum, baik pidana maupun perdata, intimidasi, hukuman maupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun atas kesaksian dan/atau pelaporan yang akan, sedang atau telah diberikannya, kecuali kesaksian dan/atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik. Perseroan memberikan perlindungan kepada pelapor atas kemungkinan dilakukannya hal-hal antara lain, pemecatan yang tidak adil, penurunan jabatan atas pangkat dengan alasan yang tidak jelas dan catatan yang merugikan dalam *file* data pribadinya (*personal file record*).

The Company guarantees the confidentiality of the whistleblower's identity, unless disclosure is necessary in connection with a report or investigation conducted by the authorities. Reports submitted anonymously will still be processed, but will first consider the sincerity of the report's contents, credibility, and the evidence submitted, as well as the possibility of confirming the report. The Company guarantees the whistleblower against all legal claims, both criminal and civil, intimidation, punishment, or unpleasant actions from any party for testimony and/or reports they will, are, or have provided, unless such testimony and/or reports are not provided in good faith. The Company provides protection to the whistleblower against possible actions, including unfair dismissal, demotion for unclear reasons, and detrimental records in their personal file records.

Dewan Komisaris melalui Komite Audit berperan dalam me-*review* pelaksanaan tanggung jawab Satuan Pengawasan Intern terkait dengan penerapan WBS. Satuan Pengawasan Intern memiliki tanggung jawab menerima dan memonitor pengaduan baik internal dan eskternal serta membuat laporan bulanan kepada Tim Pelindo Bersih sebagai *counterpart*. Dewan Komisaris berpandangan bahwa penerapan WBS di Perseroan telah berjalan dengan baik. Namun demikian, Dewan Komisaris memberikan arahan agar ke depannya penerapan WBS lebih ditingkatkan lagi efektivitasnya.

The Board of Commissioners, through the Audit Committee, plays a role in reviewing the Internal Audit Unit's responsibilities regarding the implementation of the WBS. The Internal Audit Unit is responsible for receiving and monitoring internal and external complaints and submitting monthly reports to its counterpart, the Pelindo Bersih Team. The Board of Commissioners believes that the WBS in the Company has been running well. However, the Board of Commissioners has provided guidance for further improvement in the effectiveness of the WBS implementation going forward.

TATA KELOLA KEBERLANJUTAN

Pelindo memandang bahwa keberlanjutan bukan hanya sebagai komitmen moral, tetapi sebagai bagian integral dari tata kelola perusahaan yang modern dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, Pelindo menerapkan tata kelola keberlanjutan (*sustainability governance*) secara terstruktur dan menyeluruh, sebagai upaya untuk menciptakan nilai jangka panjang yang seimbang antara kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Pelindo telah mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam kebijakan korporasi, rencana strategis, serta proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi. Tata kelola keberlanjutan ini dijalankan melalui peran aktif Dewan Komisaris dan Direksi, didukung oleh unit kerja terkait serta sistem pengawasan internal yang memastikan seluruh inisiatif berjalan sesuai dengan regulasi dan tujuan perusahaan.

SUSTAINABILITY GOVERNANCE

Pelindo views sustainability not merely as a moral commitment, but as an integral part of modern and responsible corporate governance. Therefore, Pelindo implements sustainability governance in a structured and comprehensive manner, in an effort to create long-term value that balances economic, social, and environmental performance.

Pelindo has integrated sustainability principles into its corporate policies, strategic plans, and decision-making processes at all levels of the organization. This sustainability governance is implemented through the active role of the Board of Commissioners and Board of Directors, supported by relevant work units and an internal supervisory system that ensures all initiatives are carried out in accordance with regulations and Company objectives.

Sebagai bentuk konkret, Pelindo menyelaraskan program dan target keberlanjutan dengan kerangka *Environmental, Social, and Governance* (ESG) serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Perusahaan juga menerapkan sistem pelaporan keberlanjutan yang transparan dan terukur melalui publikasi rutin Laporan Keberlanjutan, yang disusun mengacu pada standar internasional seperti GRI (*Global Reporting Initiative*).

Untuk memastikan efektivitas implementasi, Pelindo memperkuat kapabilitas organisasi melalui penyusunan kebijakan keberlanjutan, peningkatan literasi ESG, serta evaluasi dan pengukuran kinerja keberlanjutan secara berkala. Sistem pengelolaan risiko juga telah diadaptasi untuk mengakomodasi risiko-risiko terkait perubahan iklim, tanggung jawab sosial, dan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Dengan penerapan tata kelola keberlanjutan yang terintegrasi, Pelindo berkomitmen untuk terus berkontribusi pada pembangunan nasional yang inklusif dan ramah lingkungan, sekaligus menjaga daya saing dan ketahanan usaha di masa depan.

TATA KELOLA TERINTEGRASI

Sebagai wujud transparansi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia (Persero)/Pelindo, serta sebagai tindak lanjut ketentuan yang tercantum pada Peraturan Menteri BUMN PER-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN. Pelindo membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi yang berada di bawah organ Dewan Komisaris. Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi pada Perusahaan Konglomerasi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) harus senantiasa berlandaskan pada 6 (Enam) prinsip dasar tata kelola yang baik yaitu:

1. Keterbukaan (*Transparency*). Perseroan menjamin adanya keterbukaan dan objektivitas dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan untuk menjalankan kegiatan usahanya. Perseroan harus menyediakan informasi yang bersifat materiil dan relevan mengenai Perusahaan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh para Pemangku Kepentingan. Perseroan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya informasi yang dipersyaratkan oleh Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga hal-hal yang penting dan mempengaruhi pengambilan keputusan para Pemangku Kepentingan sesuai dengan klasifikasi Informasi Perusahaan.
2. Akuntabilitas (*Accountability*). Perseroan bekerja dengan akuntabilitas tinggi serta mempertanggungjawabkan segala tindakannya secara transparan dan wajar untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku, etika perilaku bisnis, dan budaya Perusahaan dengan tetap memperhatikan kepentingan Stakeholders guna mencapai kinerja Perseroan secara berkesinambungan.

As a concrete measure, Pelindo aligns its sustainability programs and targets with the Environmental, Social, and Governance (ESG) framework and the Sustainable Development Goals (SDGs). The Company also has a transparent and measurable sustainability reporting system through the regular publication of Sustainability Reports, which are prepared in accordance with international standards such as the Global Reporting Initiative (GRI).

To ensure effective implementation, Pelindo is strengthening its organizational capabilities by developing sustainability policies, increasing ESG literacy, and regularly evaluating and measuring sustainability performance. The risk management system has also been adapted to accommodate risks related to climate change, social responsibility, and compliance with environmental regulations. By implementing integrated sustainability governance, Pelindo is committed to continuously contributing to inclusive and eco-friendly national development, while maintaining its competitiveness and business resilience for the future.

INTEGRATED GOVERNANCE

As a demonstration of transparency in the Integrated Governance within the PT Pelabuhan Indonesia (Persero)/ Pelindo Conglomerate, and as a follow-up to the provisions stipulated in the Minister of BUMN Regulation PER-02/ MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of BUMN, Pelindo has established an Integrated Governance Committee under the Board of Commissioners. The PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Conglomerate Integrated Governance implementation must always be based on the six basic principles of good governance, namely:

1. Transparency. The Company guarantees transparency and objectivity in its decision-making process when conducting its business activities. The Company must provide material and relevant information regarding the Company in a manner that is easily accessible and understandable to stakeholders. The Company must take the initiative to disclose not only the information required by the Articles of Association and applicable laws and regulations, but also matters that are important and influence the decision-making of Stakeholders, in accordance with the Company's Information classification.
2. Accountability. The Company operates with a high degree of accountability and is accountable for all its actions transparently and fairly for the benefit of the Company, in accordance with the provisions of the Articles of Association, applicable laws and regulations, ethical business conduct, and corporate culture, while still considering the interests of stakeholders to achieve sustainable corporate performance.

3. Tanggung Jawab (*Responsibility*). Perseroan berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan Perusahaan, Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melaksanakan tanggung jawab sosial antara lain kepedulian terhadap Masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar Perseroan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai sehingga terpelihara kesinambungan usaha Perseroan.
4. Kemandirian (*Independent*). Perseroan dikelola secara profesional dengan menghindari benturan kepentingan serta pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*). Dalam melaksanakan kegiatannya Perseroan senantiasa memperhatikan kepentingan berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.
6. Terpercaya (*Trusted*). Perusahaan mendapatkan kepercayaan dan dukungan penuh dari seluruh Pemangku Kepentingan.

PENILAIAN KINERJA KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris dibantu oleh komite-komite yang berada di bawah Dewan Komisaris meliputi Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko serta Komite Tata Kelola Terintegrasi. Prosedur penilaian terhadap kinerja Komite dilakukan secara tahunan. Kriteria penilaian atas kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris merupakan bagian dari KPI Dewan Komisaris yang telah disetujui oleh Pemegang Saham. Adapun kriteria penilaian kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris yaitu Pelaksanaan Rapat Internal Komite dan Laporan Penugasan Komite.

Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris menilai komite-komite tersebut telah menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam mengawasi aspek-aspek operasional dan strategis Perseroan dengan baik.

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Selama tahun 2025, terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris. Perubahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan Pemegang Saham sebagaimana penjelasan berikut:

3. Responsibility. The Company adheres to the prudential principle and ensures compliance with Company regulations, the Articles of Association, and applicable laws and regulations. It also carries out social responsibilities, including concern for the communities and environmental sustainability, especially in the Company's vicinity, by developing adequate planning and implementation to ensure the Company's business continuity.
4. Independent. The Company is managed professionally, avoiding conflicts of interest and influence/pressure from any party that is inconsistent with applicable laws and regulations and sound corporate principles.
5. Fairness and Equality. When carrying out its activities, the Company consistently considers the interests of all stakeholders based on the principles of fairness and equality.
6. Trusted. The Company enjoys the full trust and support of all stakeholders.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF COMMITTEES BELOW THE BOARD OF COMMISSIONERS

When carrying out its duties and responsibilities, the Board of Commissioners is assisted by committees, including the Audit Committee, the Nomination and Remuneration Committee, the GCG and Risk Management Monitoring Committee, and the Integrated Governance Committee. The committee performance assessments are conducted annually. The performance assessment criteria for Committees below the Board of Commissioners are part of the Board of Commissioners' KPIs, which have been approved by Shareholders. The performance assessment criteria for Committees below the Board of Commissioners include the Implementation of Internal Committee Meetings and Committee Assignment Reports.

CHANGES TO THE BOARD OF COMMISSIONERS' COMPOSITION

During 2025, there were changes to the Board of Commissioners' composition. These changes were implemented in accordance with the needs of Shareholders, as explained below:

KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) PERIODE 1 JANUARI 2025 – 25 JUNI 2025

Komposisi Dewan Komisaris periode 1 Januari 2025 sampai dengan 25 Juni 2025 sebanyak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama/Independen, 1 (satu) orang Wakil Komisaris Utama, 2 (dua) orang Komisaris Independen dan 3 (tiga) orang Komisaris sebagai berikut:

PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) BOARD OF COMMISSIONERS' COMPOSITION FOR THE PERIOD JANUARY 1, 2025 – JUNE 25, 2025

The Board of Commissioners' composition for the period January 1, 2025, to June 25, 2025, consisted of 7 (seven) members: 1 (one) President/Independent Commissioner, 1 (one) Vice President Commissioner, 2 (two) Independent Commissioners, and 3 (three) Commissioners, as follows:

Agus Suhartono	:	Komisaris Utama/Independen President/Independent Commissioner
Suntana	:	Wakil Komisaris Utama Vice President Commissioner
Jodi Mahardi	:	Komisaris Commissioner
Heru Sukanto	:	Komisaris Independen Independent Commissioner
Andus Winarno	:	Komisaris Commissioner
Elwi Danil	:	Komisaris Commissioner
Rakhman Fuady Kurniawan	:	Komisaris Independen Independent Commissioner

KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) PERIODE 25 JUNI 2025 – 19 SEPTEMBER 2025

Berdasarkan Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danantara Asset Management Selaku Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia Nomor: SK-169/MBU/06/2025, Nomor: SK.025/DI-DAM/DO/2025 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia pada tanggal 25 Juni 2025, memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat Heru Sukanto sebagai Komisaris Independen dan mengangkat Maximianus Puguh Djiwanto sebagai Komisaris Independen.

Dengan demikian, komposisi Dewan Komisaris periode 25 Juni 2025 sampai dengan 19 September 2025 sebanyak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama/Independen, 1 (satu) orang Wakil Komisaris Utama, 2 (dua) orang Komisaris Independen dan 3 (tiga) orang Komisaris sebagai berikut:

PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) BOARD OF COMMISSIONERS' COMPOSITION FOR THE PERIOD JUNE 25, 2025 – SEPTEMBER 19, 2025

Based on a copy of the Minister of BUMN Decree and the President Director of PT Danantara Asset Management as Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia No. SK-169/MBU/06/2025, No. SK.025/DI-DAM/DO/2025 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia, dated June 25, 2025, the Company decided to honorably dismiss Heru Sukanto as an Independent Commissioner and appoint Maximianus Puguh Djiwanto as an Independent Commissioner.

Therefore, the Board of Commissioners' composition for the period from June 25, 2025, to September 19, 2025, consisted of 7 (seven) members: 1 (one) President/Independent Commissioner, 1 (one) Vice President Commissioner, 2 (two) Independent Commissioners, and 3 (three) Commissioners as follows:

Agus Suhartono	:	Komisaris Utama/Independen President/Independent Commissioner
Suntana	:	Wakil Komisaris Utama Vice President Commissioner
Jodi Mahardi	:	Komisaris Commissioner

Andus Winarno	:	Komisaris Commissioner
Elwi Danil	:	Komisaris Commissioner
Rakhman Fuady Kurniawan	:	Komisaris Independen Independent Commissioner
Maximianus Puguh Djiwanto	:	Komisaris Independen Independent Commissioner

KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) PERIODE 19 SEPTEMBER 2025 – SAAT INI

Berdasarkan Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danantara Asset Management Selaku Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia Nomor: SK-265/MBU/09/2025, Nomor: SK.060/DI-DAM/DO/2025 Tentang Pemberhentian, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia pada tanggal 19 September 2025, memutuskan:

1. Memberhentikan dengan hormat Andus Winarno sebagai Komisaris.
2. Mengangkat Arief Poyuono sebagai Komisaris Independen dan Ilhamsyah sebagai Komisaris
3. Dengan demikian, komposisi Dewan Komisaris periode 19 September 2025 sampai dengan saat ini sebanyak 8 (delapan) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama/Independen, 1 (satu) orang Wakil Komisaris Utama, 3 (tiga) orang Komisaris Independen dan 3 (tiga) orang Komisaris sebagai berikut:

PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) BOARD OF COMMISSIONERS' COMPOSITION FOR THE PERIOD SEPTEMBER 19, 2025 – PRESENT

Based on a copy of the Minister of BUMN Decree and the President Director of PT Danantara Asset Management as Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia No. SK-265/MBU/09/2025, No. SK.060/DI-DAM/DO/2025 Concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of the Limited Liability Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia on September 19, 2025, decided to:

1. Honorably dismiss Andus Winarno as Commissioner.
2. Appoint Arief Poyuono as Independent Commissioner and Ilhamsyah as Commissioner.
3. Therefore, the Board of Commissioners' composition for the period September 19, 2025, to present comprised 8 (eight) members: 1 (one) President/Independent Commissioner, 1 (one) Vice President Commissioner, 3 (three) Independent Commissioners, and 3 (three) Commissioners as follows:

Agus Suhartono	:	Komisaris Utama/Independen President/Independent Commissioner
Suntana	:	Wakil Komisaris Utama Deputy President Commissioner
Jodi Mahardi	:	Komisaris Commissioner
Elwi Danil	:	Komisaris Commissioner
Rakhman Fuady Kurniawan	:	Komisaris Independen Independent Commissioner
Maximianus Puguh Djiwanto	:	Komisaris Independen Independent Commissioner
Arief Poyuono	:	Komisaris Independen Independent Commissioner
Ilhamsyah	:	Komisaris Commissioner

PENUTUP

Demikian laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris atas kinerja dan pelaksanaan usaha Perseroan di tahun 2025. Ke depan, Dewan Komisaris mendorong Direksi untuk terus memperkuat eksekusi strategi, meningkatkan sinergi antar lini bisnis, serta mengakselerasi inovasi guna merespons perubahan lingkungan usaha yang semakin dinamis. Dengan fondasi yang semakin kokoh, Dewan Komisaris optimis Pelindo akan mampu mempertahankan kinerja positif dan berkontribusi lebih besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Akhir kata, Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi kepada Direksi dan seluruh insan Pelindo atas dedikasi dan kinerja yang telah ditunjukkan sepanjang tahun 2025, serta kepada pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan.

CLOSING

This concludes the Board of Commissioners' supervisory report on the Company's performance and business implementation in 2025. Moving forward, the Board of Commissioners encourages the Board of Directors to continue strengthening the strategy execution, enhance synergies between business lines, and accelerate innovations to respond to the increasingly dynamic business environment. With an increasingly solid foundation, the Board of Commissioners is optimistic that Pelindo will be able to maintain positive performance and contribute even more to driving national economic growth.

Finally, the Board of Commissioners would like to express its appreciation to the Board of Directors and all Pelindo employees for their dedication and performance throughout 2025, as well as to shareholders and all stakeholders for their support and trust.

Jakarta, 29 April 2026
Jakarta, April 29, 2026

Atas Nama Dewan Komisaris | On Behalf of the Board of Commissioners

Agus Suhartono

Komisaris Utama/Independen
President/Independent Commissioner

PELINDO
INDONESIA MARITIME GATEWAY

Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2025 PT Pelabuhan Indonesia (Persero)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tahun 2025 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 29 April 2026
Jakarta, April 29, 2026

ANGGOTA DIREKSI,
MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS,

Achmad Muchtasyar
Direktur Utama
President Director

Drajat Sulistyo
Wakil Direktur Utama
Vice President Director

Boy Robyanto
Direktur Manajemen Risiko
Risk Mangement Director

Dwi Fatan Lilyana
Direktur SDM dan Umum
Human Resources and General Affairs Director

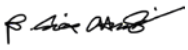

Bachtiar Soeria Atmadja
Direktur Keuangan
Finance Director

Muhammad Suriawan Wakan
Direktur Teknik
Technical Director

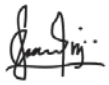

Farid Padang
Direktur Komersial
Commercial Director

Prasetyo
Direktur Pengembangan Usaha
Business Development Director

Hendri Ginting
Direktur Hubungan Kelembagaan
Institutional Relations Director

Prasetyadi
Direktur Operasi
Operations Director

Statement by the Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners concerning Responsibility for the 2025 Annual Report of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)

We, the undersigned testify that all information disclosed, in the 2025 Annual Report of PT Pelabuhan Indonesia (Persero), is presented in its entirety. We are fully responsible for the accuracy of the contents in this Annual Report.

This Statement is hereby made in all truthfulness.

Jakarta, 29 April 2026
Jakarta, April 29, 2026

ANGGOTA KOMISARIS,
MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS,

Agus Suhartono
Komisaris Utama/Independen
President/Independent Commissioner

Suntana
Wakil Komisaris Utama
Vice President Commissioner

Jodi Mahardi
Komisaris
Commissioner

Elwi Danil
Komisaris
Commissioner

Rakhman Fuady Kurniawan
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Maximianus Puguh Djiwanto
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Arief Poyuono
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Ilhamsyah
Komisaris
Commissioner

PELINDO
INDONESIA MARITIME GATEWAY

Profil Perusahaan

Company Profile

Danantara Indonesia
PELINDO
INDONESIA MARITIME GATEWAY
PORT OF TANJUNG PRIOK

Akses Informasi
Access to Information

Kantor Pusat
Head Office

Pelindo Tower
Jl. Yos Sudarso No. 9, RT.6/RW13
Rawabadak Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara (North Jakarta) 14230, Indonesia
Telepon : 102
WhatsApp : 0811-1552-102
E-mail : customer.care@pelindo.co.id
Situs web : www.pelindo.co.id

Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretariat

Ali Sodikin
Email: Ali.Sodikin@pelindo.co.id

Media Sosial
Social Media
Facebook : Pelabuhan Indonesia
X : @indonesiaport
Instagram : @pelindo
Youtube : Pelindo
Tiktok : Pelindo_official

Identitas Perusahaan
Company Identity

Nama Perusahaan
Company Name

PT Pelabuhan Indonesia (Persero)

Nama Panggilan
Short Name

Pelindo

Bidang Usaha
Line of Business

Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Kepelabuhan
Organizing and Operating Port Services

Kepemilikan
Ownership

100% Pemerintah Republik Indonesia
The Government of the Republic of Indonesia

Tanggal Pendirian
Date of Establishment

5 Februari 1960
February 5, 1960

Dasar Hukum Pendirian
Legal Basis of Establishment

Akta Pendirian No. 3 tanggal 1 Desember 1992
Deed of Establishment No. 3 dated December 1, 1992

Status

Badan Usaha Milik Negara (Persero)
State-Owned Enterprise (Persero)

Modal Dasar
Authorised Capital

Rp156.000.000.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Issued and Fully Paid-in Capital

Rp40.575.584.000.000

Jumlah Pekerja
Number of Employees

6.515 orang per 31 Desember 2025*
people as of December 31, 2024*

*Pekerja Organik | *Organic Employees

Data Jaringan Kantor
Office Network

- 1 Kantor Pusat
- 13 Pelabuhan Regional I
- 12 Pelabuhan Regional II
- 20 Pelabuhan Regional III
- 22 Pelabuhan Regional IV
- 4 *Sub-Holding*

- 1 Head Office
- 13 Regional I Ports
- 12 Regional II Ports
- 20 Regional III Ports
- 22 Regional IV Ports
- 4 Sub-Holding

Nama dan Alamat Kantor Wilayah dan Kantor Cabang

Names and Addresses of Regional Offices and Branch Offices

REGIONAL I

Jl. Lingkar Pelabuhan No. 1, Belawan
Medan, Indonesia 20411
Telp / Phone: (061) 41000055
Email: info@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Dumai
Jl. Sultan Syarif Kasim No. 1 Dumai
Telp / Phone : -
Email: dumai@pelindo1.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Tanjung Pinang
Jl. Sri Bayintan No. 1 Kel. Kijang Bintan 29151
Telp / Phone : -
Email: tanjungpinang@pelindo.co.id tpi-humas@pelindo1.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Pekanbaru
Jl. Saleh Abbas No. 3 Pekanbaru
Telp: (0761) 22826
Email: pekanbaru@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Kuala Tanjung
Jl. Pelabuhan No. 1 Kuala Tanjung Kec. Sei Suka, Batubara 21257
Telp / Phone : (0622) 620282
Email: kualatanjung@pelindo1.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Tanjung Balai Karimun
Jl. Teluk Air No. 12, Tanjung Balai Karimun 29661
Telp / Phone : -
Email: tbkarimun.care@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Sibolga
Jl. Horas Pelabuhan Baru, Sibolga 22532
Telp / Phone : (0631) 3270417
Email: sibolga@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Malahayati
Jl. Laksamana Malahayati KM. 32,5 Desa Lamreh Krueng Raya, Kec. Mesjid Raya Aceh Besar 23301
Telp / Phone : (0651) 23166
Email: malahayati@pelindo1.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Tanjung Balai Asahan
Jl. Pelabuhan Teluk Nibung Tanjung Balai Asahan, Desa/Kelurahan Perjuangan, Kec. Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara 21332
Telp / Phone : (0623) 92022
Email: tbasahan@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Lhoukseumawe
Jl. Pelabuhan Umum Krueng Geukeuh Lhoukseumawe, Aceh Utara 24354
Telp / Phone : (0645) 56816
Email: lhoukseumawe@pelindo1.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Tembilahan
Jl. Jend. Sudirman No. 76 Tembilahan 29121
Telp / Phone : -
Email: tembilahan.care@pelindo1.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Gunung Sitoli
Jl. KL. Yos Sudarso Pelabuhan Angin Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara 22810
Telp / Phone : -
Email: gunungsitoli@pelindo1.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Belawan
Jl. Kapten R. Sulian No. 1 Belawan, Sumatera Utara - 20411
Telp / Phone : (061) 6941919
Email: belawan@pelindo1.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Batam
Jl. Kuda Laut No 8, Batu Ampar, Batam 29453
Telp: -
Email: batam@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

REGIONAL II

Jl. Pasoso No. 1, Tanjung
Priok Jakarta Utara, Indonesia 14310
Telp / Phone : (021) 430 1080
Email: regional2@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Tanjung Priok
Jl. Raya Pelabuhan No. 9 Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310
Telp / Phone : (021) 4301080
Email: priok@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Panjang
Jl. Yos Sudarso No. 337 Pidada, Panjang, Kota Bandar Lampung, Lampung 35241
Telp / Phone : 0813 6926 8413
Email: pelindo.regional2panjang@gmail.com
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Palembang
Jl. Belinyu No. 1, Boom Baru Palembang 30115
Telp / Phone : (0711) 710611
Email: palembang@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Pontianak
Jl. Pak Kasih No. 11 Pontianak, Kalimantan Barat
Telp / Phone : (0561) 732094
Email: pontianak@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Banten
Jl. Raya Pelabuhan No. 1 Ciwandan, Banten, 42446
Telp / Phone : (0254) 601221, 08119827778
Email: banten@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Teluk Bayur
Jl. Semarang No. 3 Teluk Bayur, Sumatera Barat 25217
Telp / Phone : (0751) 61646
Email: telukbayur@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Bengkulu
Jl. Jl. Yos Sudarso No.9 Pulau Baai, Tlk. Sepang, Kp. Melayu, Kota Bengkulu, Bengkulu 38216
Telp / Phone : (0736) 51409
Email: bengkulu@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Jambi
Jl. Raya Pelabuhan KM. 9 Talang Duku, Jambi 36363
Telp / Phone : (0741) 35070
Email: cs.jambi@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Cirebon
Jl. Perniagaan No. 4 Cirebon, Jawa Barat 45112
Telp / Phone : (0231) 204109
Email: cirebon@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Pangkal Balam
Jl. Yos Sudarso No. 1 Bangka
Telp / Phone : (0717) 424990
Email: pangkalanbalam@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Tanjung Pandan
Jl. Pelabuhan Tanjungpandan No.1, Tj. Pandan, Kec. Tj. Pandan, Kabupaten Belitung, Kep. Bangka Belitung 33411
Telp / Phone : (0719) 21049
Email: tanjungpandan@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Sunda Kelapa
Jl. Maritim No. 8 Sunda Kelapa, Jakarta, 14430
Telp / Phone : (021) 6928888
Email: sundakelapa@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

REGIONAL III

Jl. Perak Timur No.610, Perak Utara Surabaya, Indonesia 60165
Telp / Phone: (031) 329 8631
Email: regional3@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Sub Regional Jawa
Jl.Perak Timur No.620 Surabaya
Telp / Phone: (031) 3285311
Email: tanjungperak@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Gresik
Jl. Yos Sudarso No. 1 Gresik
Telp / Phone: (031) 3981941/3974542
Email: gresik@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Kalimas
Gedung GSN (Gapura Surya Nusantara) Jl. Perak Timur No.620 Surabaya
Telp / Phone: (031) 3285311
Email: admin.kalimas@pelindomultiterminal.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Sub Regional Kalimantan
Jl. Barito Hilir No.6, Telaga Biru, Kec. Banjarmasin Bar., Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70119
Telp / Phone: (0511) 3353670
Email: banjarmasin@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Batulicin
Jl. Pelabuhan Samudera No. 124 Tanah Bumbu Kalimantan Selatan
Telp / Phone: (0518) 70305
Email: batulicin@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Tanjung Emas
Jl. Coaster No. 10 Semarang
Telp / Phone: (024) 3545721
Email: tanjungemas@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Kotabaru
Jl. Raya Stagen KM. 11 No. 9 Kotabaru, Stagen, Kalimantan Selatan
Telp / Phone: (0518) 21214
Email: kotabaru@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Tanjung Intan
Jl. Laut Jawa Nomor 1, Cilacap, Jawa Tengah, Kode Pos 53213
Telp / Phone: (0282) 534651
Email: tanjung.intan@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Tanjung Wangi
Jl. Raya Situbondo - Ketapang - Banyuwangi
Telp / Phone: 081228640200
Email: sugeng.riadi@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Bagendang
Jl. HM Arsyad Km 23
Telp / Phone: -
Email: spmtbagendang.ga01@gmail.com
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Bumiharjo
Jl. Pelabuhan CPO RT.18 Kelurahan Kumai Hulu
Telp / Phone: -
Email: spmtbumiharjo@gmail.com
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Trisakti
Jl. Barito Hilir No 6 Trisakti , Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan
Telp / Phone: 0511-3366813 / 0511-3353416
Email: banjarmasin@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Sub Regional Bali Nusa Tenggara
Jl. Raya Pelabuhan Benoa No.1 Pedungan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali 80222
Telp / Phone: (0361) 720560
Email: benoa@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Badas
Jl. Labuhan Badas No. 11 Sumbawa, Nusa Tenggara Timur
Telp / Phone: (0371) 2629120
Email: badas@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Benoa
Jl. Raya Pelabuhan Benoa Denpasar
Telp / Phone: (0361) 720560
Email: benoa@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Bima
Jl. Martadinata No. 1 Kel. Tanjung Kec. Rasane Barat Kota Bima
Telp / Phone: (0374) 43726
Email: bima@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Celukan Bawang
Jl. Pelabuhan Celukan Bawang No. 35 Buleleng Bali
Telp / Phone: (0362) 92333
Email: celukanbawang@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Ende - Ippi
Jl. Hatta No. 1 Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur
Telp / Phone: (0381) 21150
Email: ende@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Tenau Kupang
Jl. Yos Sudarso No.23 Kec.Alak, Kel. Alak
Telp / Phone: (0380)890071/72
Email: tenaukupang@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Labuan Bajo
Pelabuhan Multipurpose Manjarite Kel. Wae Kelambu Kec. Komodo
Telp / Phone: 081237726018
Email: planner.bajo@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Lembar
Jl. Raya Pelabuhan No. 5 Lembar Lombok
Telp / Phone: (0370) 681260
Email: lembar@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Maumere
Jl. Kuneng No. 2 Maumere Nusa Tenggara Timur
Telp / Phone: (0382) 21054
Email: maumere@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Waingapu
Jl. Nanga Mesi No. 16 Waingapu, Sumba Timur Nusa Tenggara Timur
Telp / Phone: (0381) 21150
Email: waingapu@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

REGIONAL IV

Jl. Soekarno No. 1
Makassar, Indonesia 90173
Telp / Phone : -
Email: regional4@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Parepare
Jl. Tarakan No. 1 Cappa Ujung Parepare
Telp / Phone : (0421) 21635
Email: parepare@pelindo.co.id
Web:www.pelindo.co.id

Pelabuhan Pantoloan
Jl. Bahari No. 23, Pantoloan
Telp / Phone : -
Email: pantoloan@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Kendari
Jl. Pelabuhan Kontainer No. 2 RT 01/RW 01, Kel. Bungkutoko, Kec. Nambo Kota Kendari, 93234
Telp / Phone : (0401) 3121978
Email: kendari@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Gorontalo
Jl. Mayor Dullan No. 176 Gorontalo
Telp / Phone : (0435) 821216
Fax: (0435) 824808
Email: gorontalo@inaport4.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Samarinda
Jl. Niaga Timur No. 130, Pelabuhan Samarinda Kota, Samarinda 75112
Telp / Phone : (0541) 741615
Email: samarindapelindo@gmail.com
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Balikpapan
Jl. Yos Sudarso No. 30 Balikpapan
Telp / Phone : (0542) 737457
Email: balikpapan@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Ambon
Jl. Yos Sudarso No. 1 Kodya Ambon
Telp / Phone : -
Email: humas.regional4manado@gmail.com
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Bitung
Jl. D.S. Sumolang No.1 Bitung
Telp / Phone : 0438) 3121978
Email: bitung@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Makassar
Jl. Soekarno No.1 Makassar.
Telp / Phone : (0411) 3616549
Email: makassar@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Nunukan
Jl. Pelabuhan Baru No. 10 Nunukan
Telp / Phone : (0556) 21495
Email: nunukan@pelindo.co.id
Web:www.pelindo.co.id

Pelabuhan Tarakan
Jl. Yos Sudarso No. 9 Tarakan
Telp / Phone : -
Email: tarakan@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Ternate
JL. A. Yani Kompleks Pelabuhan, Ternate
Telp / Phone : (0921) 3121574
Email: ternate@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Sorong
Jl. A. Yani No. 13 Sorong
Telp / Phone : -
Email: sorong@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Jayapura
Jl. Koti II No. 21 Jayapura
Telp / Phone : -
Email: jayapura@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Merauke
Jl. Yos Sudarso No. 9 Merauke
Telp / Phone : -
Email: merauke@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Fakfak
Jl. Izak Telussa No. 5 Fakfak
Telp / Phone : 0956 2101508
Email: fakfak@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Manokwari
Jl. Banjarmasin No. 3, Kel. Manokwari Timur, Kec. Manokwari Barat, Kab. Manokwari, Papua Barat
Telp / Phone : (0986) 211334

Email: manokwari@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Tolitoli
Jl. Sidoarjo No.394 Tolitoli
Telp / Phone : (0453) 21124
Email: toli-toli@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Tanjung Redeb
Jl. ST M Aminuddin No 9 RT 10 Kel. Sambaliung Kec. Sambaliung 77371
Telp / Phone : -
Email: tanjungredeb@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Bontang
Jl. Ir. H. Juanda No. 43 Kota Bontang
Telp / Phone : (0548) 22786
Email: uptbtg@yahoo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Biak
Jl. Jend. Sudirman No. 51 Biak
Telp / Phone : (0981) 21135, 21812, 24070
Email: biak@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Pelabuhan Manado
JL. Pelabuhan III No. 1 Lingkungan VI Kel. Wenang Utara, Kec.Wenang, Kota Manado
Telp / Phone : (0431) 852138, 86364
Email: humas.regional4manado@gmail.com

Brand Perusahaan
Company Brand

Penerapan *branding* yang benar merupakan bagian terpenting dari proses mencapai cita-cita Pelindo menjadi Pemimpin ekosistem Maritim Terintegrasi dan berkelas dunia.

Applying the right branding is an important part of the process of achieving Pelindo's goal to be a world- class integrated leader in the maritime ecosystem.

Penerapan *branding* yang benar merupakan bagian terpenting dari proses mencapai cita-cita Pelindo menjadi Pemimpin ekosistem Maritim Terintegrasi dan berkelas dunia.

Applying the right branding is an important part of the process of achieving Pelindo's goal to be a world- class integrated leader in the maritime ecosystem.

Mengambil inspirasi dari bentuk jalur atau rute yang sibuk, padat dan simpang siur, yang menggambarkan Pelindo sebagai penyedia jasa kepelabuhanan dan logistik terintegerasi yang selalu aktif dan berperan besar dalam transportasi laut – sebagai urat nadi perekonomian nasional – sekaligus mendukung terwujudnya tol laut Indonesia.

Takes inspiration from the busy, congested and confusing shape, and describes Pelindo as a provider of integrated port and logistics services that is always active and plays a major role in sea transportation - as the lifeblood of the national economy - as well as supports the realization of the Indonesian sea highway.

Mengambil huruf P yang menjadi inisial dari Pelindo sekaligus berbentuk ikan, yang menjadi lambang habitat makhluk hidup laut penting bagi Indonesia yang merupakan negara maritim. Ini juga menjadi simbol dari komitmen Pelindo untuk menjaga kekayaan alam Indonesia dengan terus berkontribusi dalam mendukung kelestarian ekosistem laut di wilayah operasinya.

The letter P is the first letter of Pelindo and takes the form of a fish, a symbol of important marine life for Indonesia, which is a maritime country. This is also a symbol of Pelindo's commitment to preserving Indonesia's natural wealth by continuing to contribute to supporting the preservation of marine ecosystems in its operational areas.

Warna biru adalah warna laut Indonesia, yang sangat dekat dengan Pelindo. Warna ini melambangkan stabilitas, kepercayaan, integritas, profesionalisme dan pengabdian. Warna ini juga melambangkan simbolisasi dari upaya Pelindo, sebagai bagian dari BUMN untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi seluruh *stakeholders*.

The blue color is the color of the Indonesian sea, which Pelindo is very close to. This color symbolizes stability, trust, integrity, professionalism and devotion. This color also symbolizes Pelindo's efforts, as a BUMN to always provide the best for all stakeholders.

Riwayat Singkat Perusahaan

Brief History of the Company

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia (dahulu "Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II" atau "Pelindo II") ("Perusahaan" atau "PT Pelabuhan Indonesia (Persero)") pada awalnya didirikan sebagai Perusahaan Umum ("Perum") Pelabuhan II berdasarkan Peraturan Pemerintah ("PP") No. 15 Tahun 1983 *juncto* PP No. 5 Tahun 1985. Perum Pelabuhan II merupakan Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") yang berada di bawah pembinaan Departemen Perhubungan Republik Indonesia.

Berdasarkan PP No. 57 Tahun 1991, Perum Pelabuhan II mengalami pengalihan bentuk menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Sebagai tindak lanjut PP tersebut, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) didirikan berdasarkan Akta Notaris Imas Fatimah, S.H., No. 3 tanggal 1 Desember 1992. Akta pendirian ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-4754.HT.01.01. TH.93 tanggal 17 Juni 1993. Sejak terbentuknya Kementerian Badan Usaha Milik Negara pada tahun 1998, Perusahaan berada di bawah pembinaan Kementerian BUMN. Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan yang diaktakan dalam Akta Notaris No. 07 dari Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn. tanggal 1 Oktober 2021 mengenai persetujuan perubahan nama, anggaran dasar dan

The Limited Liability Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia (formerly "Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II" or "Pelindo II") ("Company" or "PT Pelabuhan Indonesia (Persero)") was initially established as a Public Company ("Perum") Pelabuhan II based on Government Regulation ("PP") No. 15 of 1983 in conjunction with PP No. 5 of 1985. Perum Pelabuhan II is a State-Owned Enterprise ("BUMN") under the guidance of the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia.

Based on PP No. 57 of 1991, Perum Pelabuhan II underwent a change to become a Limited Liability Company (Persero). As a follow-up to this PP, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) was established based on a Notarial Deed No. 3 dated December 1, 1992 before Imas Fatimah, S.H., Notary. This deed of establishment was approved by the Republic of Indonesia Minister of Justice Decree No. C2-4754. HT.01.01. TH.93 dated June 17, 1993. Since the formation of the Ministry of State- Owned Enterprises (SOEs) in 1998, the Company has been under the guidance of the Ministry of SOEs. The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently based on a Company's General Meeting of Shareholders Resolution, which was notarized in Notarial Deed No. 07 before Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn. Notary dated October 1, 2021

logo Perusahaan. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui suratnya No. AHU-0053936. AH.01.02 tanggal 1 Oktober 2021.

Berdasarkan Akta No. 09 tanggal 21 Agustus 2019, Pemerintah Negara Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri BUMN melakukan perubahan jenis saham yang semula tanpa seri menjadi terdiri dari saham Seri A Dwiwarna dan saham Seri B.

Maksud dan tujuan Perusahaan adalah melakukan usaha di bidang penyelenggaraan dan pengusahaan jasa kepelabuhanan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Selain lingkup usaha tersebut di atas, Perusahaan dapat pula mendirikan dan menjalankan usaha lain yang memiliki hubungan dengan usaha kepelabuhanan. Saat ini, Perusahaan dan entitas anaknya (selanjutnya disebut "Kelompok Usaha") bergerak dalam beberapa bidang usaha yang meliputi jasa kepelabuhanan, logistik, jasa informasi teknologi, jasa pengerukan, jasa kepelatihanan dan lainnya.

Kantor pusat Perusahaan berlokasi di Gedung Pelindo Tower Jl. Yos Sudarso No. 9 Rawa Badak Utara, Koja, Jakarta 14230, Indonesia. Entitas induk dan entitas induk terakhir Perusahaan adalah Pemerintah Republik Indonesia.

Pada tanggal 1 Oktober 2021, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I ("Pelindo I"), Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III ("Pelindo III") dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV ("Pelindo IV") melakukan penggabungan ke dalam Perusahaan (dahulu Pelindo II), dengan Perusahaan (dahulu Pelindo II) sebagai perusahaan hasil penggabungan.

KETERANGAN PERUBAHAN NAMA

Berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. S-756/MBU/10/2021 tanggal 1 Oktober 2021 perihal Persetujuan Perubahan nama, Perubahan Anggaran dasar dan Logo Perusahaan, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) berganti nama menjadi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau disingkat Pelindo.

concerning the approval of the change of name, articles of association and logo of the Company. The Articles of Association amendment was approved by the Republic of Indonesia Minister of Law and Human Rights letter No. AHU- 0053936.AH.01.02 October 1, 2021.

Based on Deed No. 09 dated August 21, 2019, the Government of the Republic of Indonesia, represented by the Minister of SOEs, changed the type of shares, which were originally without series, to Series A and Series B shares Dwiwarna shares.

The Company's purpose and objective is to conduct business in the field of port service operations as well as optimizing the use of the Company's resources to produce high quality and highly competitive goods and/or services to obtain/pursue profits to increase the value of the Company by applying the principles of a Limited Liability Company.

In addition to the business scope mentioned above, the Company can also establish and run other businesses related to the port business. Currently, the Company and its subsidiaries (hereinafter referred to as the "Business Group") are engaged in several business fields including port services, logistics, information technology services, dredging services, training services and others.

The Company's head office is located at Gedung Pelindo Tower Jl. Yos Sudarso No. 9 Rawa Badak Utara, Koja, Jakarta 14230, Indonesia. The parent and ultimate parent entity of the Company is the Government of the Republic of Indonesia.

On October 1, 2021, the Limited Liability Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I ("Pelindo I"), the Limited Liability Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III ("Pelindo III") and the Limited Liability Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV ("Pelindo IV") merged into one Company (formerly Pelindo II), with the Company (formerly Pelindo II) as the resulting company.

EXPLANATION OF ANY NAME CHANGE

Based on the Republic of Indonesia Minister of SOEs Letter No. S-756/MBU/10/2021 dated October 1, 2021 concerning Approval of Change of Name, Change of Articles of Association and Company Logo, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) changed its name to PT Pelabuhan Indonesia (Persero), abbreviated to Pelindo.

Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan
Vision, Mission, and Corporate Culture

Visi Vision

Menjadi Pemimpin Ekosistem Maritim Terintegrasi dan Berkelas Dunia

To Be a World-Class Integrated Maritime Ecosystem Leader

Visi tersebut merupakan pernyataan cita-cita Perusahaan menjadi pintu gerbang utama jaringan logistik global di Indonesia. Cita-cita ini muncul dilandasi dengan potensi geografis, peluang bisnis serta kebijakan nasional yang membuka peluang bagi perusahaan untuk merealisasikan visi dimaksud.

This vision is a statement of the Company's aspiration to become the main gateway to the global logistics network in Indonesia. This aspiration is based on geographical potential, business opportunities and national policies that open up opportunities for companies to realize the intended vision.

Misi Mission

Mewujudkan Jaringan Ekosistem Maritim Nasional Melalui Peningkatan Konektivitas Jaringan dan Integrasi Pelayanan Guna Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Realize a national maritime ecosystem network through increased network connectivity and service integration, to support Indonesia's economic growth.

Menyediakan jasa kepelabuhan dan maritim yang handal dan terintegrasi dengan kawasan industri untuk mendukung jaringan logistik Indonesia dan global dengan memaksimalkan manfaat ekonomi Selat Malaka.

Providing reliable port and maritime services that are integrated with industrial areas to support the Indonesian and global logistics network by maximizing the economic benefits of the Malacca Strait.

REVIU VISI DAN MISI OLEH DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dewan Komisaris dan Direksi telah melakukan kajian dan *review* terhadap visi dan misi Perseroan, dan menyatakan bahwa visi dan misi tersebut masih relevan untuk kondisi saat ini dan sesuai dengan tantangan dan peluang yang dihadapi Perseroan ke depan. Visi dan Misi Perseroan telah dibahas dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada pembahasan RKAP (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan) tahun 2025.

BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS REVIEW OF THE VISION AND MISSION

The Board of Commissioners and Board of Directors conducted a study and reviewed the Company's vision and mission, and stated that the vision and mission were still relevant to the Company's current conditions and the challenges and opportunities it will face in the future. The Board of Commissioners and Board of Directors reviewed the Company's Vision and Mission during the discussion of the 2025 RKAP (Company Budget Work Plan).

Budaya Perusahaan

Highlights Performance

AKHLAK

Amanah
Trustworthy

Memegang teguh kepercayaan yang diberikan.
Uphold the trust given.

- Memenuhi janji dan komitmen;
- Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan;
- Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.
- Keep promises and commitments
- Responsible for the tasks, decisions and actions taken
- Firmly uphold moral and ethical values

Kompeten
Competent

Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.
Continue to learn and develop abilities.

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
- Membantu orang lain belajar;
- Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.
- Improve self-competence to respond to ever-changing challenges;
- Help others learn;
- Complete assignments of the highest quality.

Harmonis
Harmonious

Saling peduli dan menghargai perbedaan.
Caring for each other and respect for differences.

- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
- Suka menolong orang lain;
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif.
- Respect everyone regardless of their background;
- Like to help others;
- Build a conducive work environment.

Loyal
Loyalty

Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara.
Dedicated and prioritizing the interest of the Nation and State.

- Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN, dan Negara;
- Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar;
- Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etik.
- Maintain the good name of fellow employees, leaders, SOE and the State;
- Willing to sacrifice to achieve a greater goal;
- Obey the leadership as long as not violating the law and ethics.

Adaptif
Adaptive

Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan.
Continue to innovate and be enthusiastic in driving or facing changes

- Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik;
- Terus menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi;
- Bertindak proaktif.
- Quickly adjust to be better;
- Continuously making improvements in accordance with technological developments;
- Be proactive.

Kolaboratif
Collaborative

Membangun kerja sama yang sinergis
Build synergistic collaboration.

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah;
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.
- Give opportunities for various parties to contribute;
- Be open in collaborating to generate added value;
- Mobilize the use of various resources for common goal

Kegiatan Usaha
Business Activities

KEGIATAN USAHA MENURUT ANGGARAN DASAR DAN YANG DIJALANKAN

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan berlandaskan pada Anggaran Dasar Nomor: AHU-0033124.AH.01.11. tahun 2026 Tanggal 19 Februari 2026. Maksud dan tujuan Perseroan menurut Anggaran Dasar adalah melakukan kegiatan pengusahaan di pelabuhan berupa penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan dan jasa terkait dengan kepelabuhanan dan mendukung ekosistem maritim, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

KEGIATAN UTAMA

a. Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut;
2. Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai dan Danau;
3. Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang);
4. Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya;
5. Pergudangan dan Penyimpanan;
6. Aktivitas *Cold Storage*;

BUSINESS ACTIVITIES BASED ON THE CURRENT ARTICLES OF ASSOCIATION

When conducting its business, the Company is guided by the Articles of Association No. AHU-0033124.AH.01.11 of 2026, dated February 19, 2026. The Company's purpose and objective, based on the Articles of Association, is to conduct business activities in ports by providing port and port-related services and supporting the maritime ecosystem, as well as optimizing the use of the Company's resources to produce high-quality and competitive goods and/or services to obtain/pursue profits and increase the Company's value by implementing the principles of a Limited Liability Company. To achieve these purposes and objectives, the Company carries out the following business activities:

MAIN ACTIVITIES

1. Sea Port Service Activities;
2. River and Lake Port Service Activities;
3. Cargo Handling (Loading and Unloading of Goods);
4. Warehousing and Other Storage;
5. Warehousing and Storage;
6. Cold Storage Activities;

7. Aktivitas *Bounded Warehousing* atau Wilayah Kawasan Berikat;
8. Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang;
9. Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan Lainnya;
10. Jasa Instalasi Konstruksi Navigasi Laut, Sungai dan Udara;
11. Pengerukan;
12. Aktivitas Tally Mandiri;
13. Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan;
14. Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum;
15. Penampungan dan Penyaluran Air Baku;
16. Instalasi Saluran Air (Plambing);
17. Aktivitas Penunjang *Treatment* Air;
18. Perdagangan Eceran BBM, BBG dan LPG di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut dan Udara;
19. Perdagangan Eceran BBM, BBG, dan LPG Selain di Sarana Pengisian Bahan-Bakar Transportasi Darat, Laut dan Udara;
20. Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI);
21. Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi;
22. Pengumpulan Limbah Berbahaya;
23. Aktivitas Penyimpanan B3;
24. Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah lainnya;
25. Transmisi Tenaga Listrik;
26. Distribusi Tenaga Listrik;
27. Penjualan Tenaga Listrik;
28. Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya;
29. Distribusi Gas Alam dan Buatan;
30. Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Intelektual Properti, Bukan Karya Hak Cipta;
31. Real Estat yang dimiliki Sendiri atau Disewa;
32. Real Estat atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) Atau Kontrak;
33. Reparasi Mesin untuk Keperluan Khusus;
34. Reparasi Mesin untuk Keperluan Umum;
35. Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung;
36. Aktivitas Pengelolaan Kapal;
37. Jasa Pengurusan Transportasi (JPT);
38. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih;
39. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi Alat-Transportasi Air;
40. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain (YTDL);
41. Jasa Sistem Komunikasi Data;
42. Aktivitas Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Sendiri;
43. Aktivitas Terminal Darat;
44. Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain (YTDL);
45. Aktivitas Perusahaan *Holding*;
46. Aktivitas Kantor Pusat;
47. Angkutan Laut dalam Negeri untuk Barang Umum;
48. Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri Untuk Barang;

7. Bounded Warehousing Activities or Bonded Zone Areas;
8. Warehouse Receipt System Warehouse Manager;
9. Other Water Transportation Support Activities;
10. Sea, River and Air Navigation Construction Installation Services;
11. Dredging;
12. Independent Tally Activities;
13. Non-Fishing Port Building Construction;
14. Drinking Water Storage, Purification and Distribution;
15. Raw Water Storage and Distribution;
16. Plumbing Installation;
17. Supporting Activities for Water Treatment;
18. Retail Trade for BBM, BBG and LPG at Land, Sea and Air Transportation Fuel Filling Facilities;
19. Retail Trade for BBM, BBG, and LPG Other Than at Land, Sea and Air Transportation Fuel Filling Facilities;
20. Wholesale Solid, Liquid and Gas Fuels and Related Products (YBDI);
21. Storage of Oil and Natural Gas;
22. Collection of Hazardous Waste;
23. B3 Storage Activities;
24. Remediation Activities and Management of Waste and Other Garbage;
25. Electric Power Transmission;
26. Electric Power Distribution;
27. Electric Power Sales;
28. Other Electric Power Supporting Activities;
29. Natural and Artificial Gas Distribution;
30. Lease without Intellectual Property Option Rights, Non Copyrighted Works;
31. Owned or Rented Real Estate;
32. Real Estate on a Fee or Contract Basis;
33. Special Purpose Engine Repairs;
34. General Purpose Engine Repairs;
35. Ship, Boat and Floating Structure Repairs;
36. Ship Management Activities;
37. Transportation Management Services (JPT);
38. Rental and Lease Activities without Option Rights for Land Transportation Equipment Non Motorized Vehicles with Four or More Wheels;
39. Rental and Lease Activities without Option Rights for Water Transportation Equipment;
40. Rental and Lease Activities without Option Rights for Machinery, Equipment and Other Tangible Goods That Cannot Be Classified Elsewhere (YTDL);
41. Data Communication System Services;
42. Special Telecommunication Activities for Own Needs;
43. Land Terminal Activities;
44. Other Business Support Services Activities That Cannot Be Classified Elsewhere (YTDL);
45. Holding Company Activities;
46. Head Office Activities;
47. Domestic Sea Transportation for General Goods;
48. Domestic Sea Transportation for Port Waters for Goods;

49. Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Khusus;
50. Taman Rekreasi;
51. Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan Lainnya;
52. Dermaga Marina;
53. Aktivitas Hiburan dan Rekreasi Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain (YTDL);
54. Kawasan Pariwisata;
55. Industri Alat Pengangkat dan Pemindah;
56. Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya.

Kegiatan Pendukung
1. Industri Pengolahan;
2. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin;
3. Konstruksi;
4. Perdagangan Besar dan Eceran: reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor;
5. Pengangkutan dan Pergudangan;
6. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum;
7. Informasi dan Komunikasi;
8. Aktivitas Keuangan dan Asuransi;
9. Real Estat;
10. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis;
11. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya;
12. Pendidikan;
13. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial;
14. Kesenian, Hiburan dan Rekreasi;
15. Aktivitas Jasa Lainnya.

Seluruh kegiatan usaha menurut Anggaran Dasar sudah dijalankan oleh Perseroan.

PRODUK DAN JASA

Pasca integrasi, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) merupakan perusahaan *holding* kepelabuhanan yang memiliki klaster bidang usaha sebagai berikut:

49. Domestic Sea Transportation for Special Goods;
50. Recreational Parks;\
51. Theme Park Activities or Other Amusement Parks;
52. Marina Piers;
53. Other Entertainment and Recreational Activities That Cannot Be Classified Elsewhere (YTDL);
54. Tourism Areas;
55. Lifting and Moving Equipment Industry;
56. Other Computer Programming Activities.

Supporting activities
1. Manufacturing Industry;
2. Procurement of Electricity, Gas, Steam/Hot Water and Cold Air;
3. Construction;
4. Wholesale and Retail Trade: repair and maintenance of cars and motorbikes;
5. Transportation and Warehousing;
6. Provision of Accommodation and Provision of Food and Beverages;
7. Information and Communication;
8. Financial and Insurance Activities;
9. Real Estate;
10. Professional, Scientific and Technical Activities;
11. Rental and Leasing Activities Without Option Rights, Employment, Travel Agents and Other Business Support;
12. Education;
13. Human Health Activities and Social Activities;
14. Arts, Entertainment and Recreation;
15. Other Service Activities.

All business activities carried out by the Company are in accordance with the Articles of Association.

PRODUCTS AND SERVICES

Post-integration, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) is a port holding company with the following business clusters:

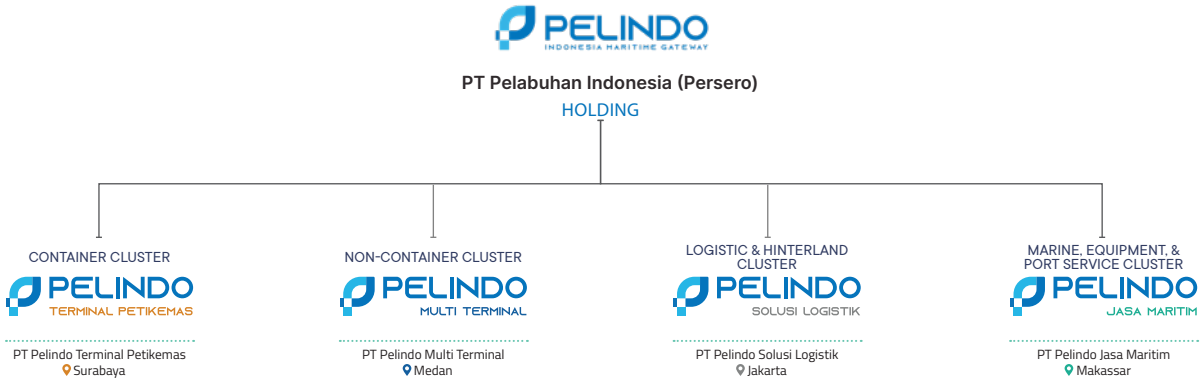

KLASTER BIDANG USAHA LAYANAN PETIKEMAS

Merupakan pelayanan bongkar muat barang petikemas mulai dari kapal hingga penyerahan kepada pemilik barang. PT Pelindo Terminal Petikemas merupakan perusahaan *subholding* dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang berperan sebagai *holding* dari sekelompok perusahaan subsidiari yang menjalankan bisnis operasi layanan terminal petikemas. Adapun lingkup bidang usaha meliputi:

1. ***Stevedoring***, Kegiatan membongkar petikemas dari kapal ke dermaga/*trailer* atau memuat petikemas dari dermaga/*trailer* ke dalam kapal.
2. ***Haulage***, Layanan pengangkutan petikemas dengan menggunakan *trailer*/*chassis* dalam daerah kerja pelabuhan dari lambung kapal ke lapangan penumpukan petikemas atau sebaliknya.
3. **Pelayanan Dermaga,** Pelayanan penanganan kapal di dermaga dengan mengatur kelancaran arus/barang di dermaga.
4. ***Receiving/Delivery***, *Receiving* merupakan kegiatan menerima petikemas dari luar area Terminal sampai tersusun di lapangan penumpukan. *Delivery* adalah kegiatan memindahkan petikemas dari lapangan penumpukan dan menyerahkannya sampai tersusun di atas kendaraan.
5. **Jasa Penumpukan**, Jasa penumpukan petikemas di lapangan penumpukan sampai dengan dikeluarkan dari lapangan penumpukan untuk dimuat atau diserahkan kepada pemilik.
6. **Jasa Lainnya**, Merupakan jasa layanan yang menunjang kegiatan yang ada di pelabuhan yang meliputi pemeriksaan karantina, pemeriksaan bea cukai, dan lain sebagainya.

KLASTER BIDANG USAHA LAYANAN NON-PETIKEMAS

Merupakan pelayanan bongkar muat barang non-petikemas mulai dari kapal hingga penyerahan kepada pemilik barang. PT Pelindo Multi Terminal merupakan perusahaan *subholding* dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang berperan sebagai *holding* dari sekelompok perusahaan subsidiari yang menjalankan bisnis operasi layanan terminal non-petikemas. Adapun lingkup bidang usaha meliputi:

1. Layanan Terminal Curah Cair, layanan terminal terdedikasi untuk bongkar muat komoditas curah cair
2. Layanan Terminal Curah kering, layanan terminal terdedikasi untuk bongkar muat komoditas curah kering
3. Layanan Terminal kendaraan, layanan terminal terdedikasi untuk bongkar muat kendaraan
4. Layanan Terminal Khusus, kerja sama layanan operasional maupun terminal operator terminal khusus
5. Layanan Terminal Multipurpose, layanan terminal terdedikasi untuk bongkar muat komoditas cargo u mum
6. Layanan TUKS, kerja sama layanan operasional terminal untuk kepentingan sendiri

CONTAINER SERVICE BUSINESS CLUSTER

A loading and unloading service for containerized goods from ships to delivery to the goods owners. PT Pelindo Terminal Petikemas is a subholding company of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) that acts as the holding for a group of subsidiary companies that run the business of operating container terminal services. The scope of business includes:

1. **Stevedoring**, the activity of unloading containers from ships to the wharf/trailer or loading containers from the wharf/ trailer into the ships;
2. **Haulage**, container transportation services using trailer/ chassis in the port work areas from the ship's hull to the container stacking fields or vice versa;
3. **Wharf Services**, ship handling services at the wharf by regulating the smooth flow of goods at the wharf;
4. **Receiving/Delivery**, picking up the containers from outside the Terminal area until they are arranged in the stacking field. Delivery is the activity of moving containers from the stacking field and handing them over until stacked on the vehicle;
5. **Stacking Service**, container stacking service in the stacking field until it is removed from the stacking field to be loaded or handed over to the owner; and
6. **Other Services**, are services that support activities at the port including quarantine inspections, customs inspections, and other services.

NON-CONTAINER SERVICES BUSINESS CLUSTER

A loading and unloading service for non-container goods from ships to delivery to the goods owners. PT Pelindo Multi Terminal is a subholding company of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) that acts as the holding of a group of subsidiary companies that run the business of operating non-container terminal services. The scope of business includes:

1. Liquid Bulk Terminal Services, a dedicated terminal service for loading and unloading liquid bulk commodities;
2. Dry Bulk Terminal Services, dedicated terminal services for loading and unloading dry bulk commodities;
3. Vehicle Terminal Services, dedicated terminal services for loading and unloading vehicles;
4. Special Terminal Services, operational service cooperation and special terminal operator terminals;
5. Multipurpose Terminal Services, dedicated terminal services for loading and unloading of general cargo commodities;
6. TUKS Service, cooperation in terminal operational services for own interest.

KLASTER BIDANG USAHA LAYANAN LOGISTIK & HINTERLAND

Merupakan layanan pendukung terkait logistik dalam jasa kepelabuhanan. PT Pelindo Solusi Logistik merupakan perusahaan *subholding* dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang berperan sebagai *holding* dari sekelompok perusahaan subsidiari dengan lingkup bisnis operasi layanan logistik pendukung jasa kepelabuhanan. Adapun lingkup bidang usaha meliputi:

1. ***End to End Logistic Services***
   a. *Warehouse & Yard*
      - Pergudangan dan Penyimpanan, layanan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir termasuk layanan *cold storage*, pengelolaan Gudang Sistem Resi Gudang (G-SRG), dan layanan pergudangan dan penyimpanan lainnya.
      - Layanan *Bounded Warehousing*/Kawasan Berikat, layanan pergudangan dalam wilayah Kawasan Berikat.
      - Layanan *Container Distribution Centre* (CDC)/*Cargo Consolidation Centre* (CCC), layanan kegiatan *stripping/stuffing* untuk selanjutnya diangkut dari dan ke kendaraan angkutan barang untuk selanjutnya didistribusikan dan layanan untuk menyimpan petikemas kosong *ex stripping/suffing*.

   b. *Freight Forwarding*
      - Layanan Angkutan/Alat Transportasi Barang, layanan pengangkutan barang umum untuk tujuan dalam negeri maupun luar negeri dan juga mencakup pengangkutan barang sewa khusus (*door-to-door*), pengangkutan barang melalui pelayaran rakyat dan pelayaran perintis dan lainnya.
      - Layanan Ekspedisi, layanan pengiriman dan pengepakan barang dalam volume besar baik yang diangkut melalui kereta/angkutan darat, angkutan laut, maupun angkutan udara.
      - Layanan Angkutan Multimoda, layanan angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit 2 (dua) moda angkutan yang berbeda atas dasar 1 (satu) kontrak sebagai dokumen.
      - Layanan Keagenan Kapal, layanan usaha untuk mengurus kepentingan kapal perusahaan angkutan laut asing dan/atau kapal perusahaan laut nasional selama berada di Indonesia.

   c. *Special Cargo Handling,* layanan logistik untuk menangani barang dengan perlakuan khusus dan ekstra *dangerous goods, oversized cargo*, hingga barang dengan suhu terkendali.

2. ***Hinterland Development Services***
   a. *Port Led Industrial/Logistic Estate Development*, pengembangan kawasan terpadu yang menghubungkan pusat produksi dengan jaringan distribusi global.
   b. *Property Development & Building Management*, pengelolaan properti yang modern, efisien dan berkelanjutan.

LOGISTICS AND HINTERLAND SERVICE BUSINESS CLUSTER

A support service related to logistics in port services. PT Pelindo Solusi Logistik is a subholding company of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) that acts as the holding of a group of subsidiary companies that run the business of logistics support port services. The scope of business includes

1. **End to End Logistic Services**
   a. Warehouse & Yard
      - Warehousing and Storage, temporary storage services for goods before they are sent to their final destination including cold storage services, Warehouse Receipt System (G-SRG) management, and other warehousing and storage services.
      - Bounded Warehousing / Bonded Zone Services, warehousing services within the Bonded Zone area.
      - Container Distribution Center (CDC), Cargo Consolidation Center (CCC) services, services for stripping/stuffing activities for further transportation from and to goods transport vehicles for further

   b. Freight Forwarding
      - Freight Services/Means of Transportation, general goods transportation services for domestic and foreign destinations including the transportation of special rental goods (door- to-door), transportation of goods through public shipping and pioneer shipping and others.

      - Expedition services, delivery and packing services for large volumes of goods, whether transported by train/land transportation, sea transportation, or air transportation.
      - Multimodal Transportation Services, goods transportation services using at least 2 (two) different modes of transportation under 1 (one) contract document.
      - Ship Agency Services, business services to manage the interests of foreign sea transportation company ships and/ or national marine company ships while in Indonesia.

   c. Special Cargo Handling, logistics services to handle goods with special treatment and extra dangerous goods, oversized cargo, to goods with controlled temperatures.

2. **Hinterland Development Services**
   a. Port Led Industrial/Logistic Estate Development, an integrated area development that connects production centers with global distribution networks.
   b. Property Development & Building Management, modern, efficient and sustainable property management.

c. *Tourism & Marina Development*
   - Menciptakan dan mengembangkan kawasan untuk destinasi wisata dan marina yang berkelas dunia.
   - Menyediaan dan mengelola tempat untuk penambatan atau berlabuh kapal pesiar/wisata dan kegiatan lain yang terkait kelautan.

KLASTER BIDANG USAHA LAYANAN *MARINE DAN EQUIPMENT*

Merupakan pelayanan jasa operasional kapal mulai dari masuk hingga keluar pelabuhan. PT Pelindo Jasa Maritim merupakan perusahaan *subholding* dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang berperan sebagai *holding* dari sekelompok perusahaan subsidiari dengan lingkup bisnis operasi layanan kapal, layanan peralatan, dan layanan pendukung kepelabuhanan lainnya. Adapun lingkup bidang usaha meliputi:

1. *Marine Services*
   a. *Ship to Ship Transfer*, merupakan layanan pemindahan muatan/kargo dari satu kapal ke kapal lainnya. Layanan ini meliputi *ship to ship operations, tug boat assist, mooring master, hingga oil spill response.*
   b. Jasa Tunda, merupakan produk atau jasa utama Perseroan yang meliputi kegiatan mendorong, menarik, menggandeng, mengawal dan membantu kapal yang berolah-gerak dalam alur pelayaran, daerah labuh jangkar, maupun kolam untuk tambat atau untuk lepas dari dermaga. Proses Pelayanan Jasa Tunda Kapal wajib dilakukan terhadap seluruh kapal-kapal yang berada di wilayah perairan wajib Pandu dan Tunda dimana Perseroan mendapatkan wilayah pelimpahan wajib Pandu dan Tunda.
   c. Jasa Pandu, merupakan produk atau jasa utama Perseroan yang wajib diberikan untuk melayani kapal masuk menuju dan keluar dermaga malalui alur Pelabuhan, agar navigasi pelayaran dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib, dan lancar demi keselamatan kapal dan lingkungan.
   d. Layanan jasa kapal lainnya, seperti *port utility & offshores, disposal, waste management*.
2. *Equipment Services,* merupakan kegiatan usaha perusahaan dalam hal penyediaan suku cadang, perbaikan dan pemeliharaan peralatan dan marine, jasa konsultan teknik, serta perdagangan besar mesin dan peralatan.
3. *Port Services*
   a. Layanan Pengerukan dan Alur, merupakan kegiatan usaha pengerukan alur-alur pelayaran, kolam pelabuhan dan lokasi lain yang memerlukan jasa keruk, reklamasi transportasi hasil keruk, pengadaan/pengembangan lahan dan bangunan serta jasa lain yang terkait.
   b. Layanan Penyediaan Utilitas dan Energi, merupakan kegiatan usaha perusahaan dalam penyediaan air bersih, kelistrikan, BBM dan gas, serta jasa lainnya yang terkait.

c. Tourism & Marina Development
   - Creating and developing areas for world-class tourist destinations and marinas.
   - Providing and managing places for cruise/ tourist ships mooring or anchoring and other marine-related activities.

MARINE AND EQUIPMENT SERVICES BUSINESS CLUSTER

A ship operational services starting from entering to exiting the port. PT Pelindo Jasa Maritim is a subholding company of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) that acts as the holding of a group of subsidiary companies that run the business of operating ship services, equipment services, and other port support services. The scope of business includes:

1. Marine Services
   a. Ship to Ship Transfer, a service for transferring cargo from one ship to another. This service includes ship to ship operations, tug boat assist, mooring master, to oil spill response.
   b. Tugboat Service, the Company's Main Product or Service including pushing and pulling, tugging, escorting and assisting ships moving in shipping lanes, anchorage areas, or ponds for mooring or leaving the wharf. The Tugboat Service process must be carried out for all ships in the Pilot and Tugboat water areas that the Company has delegated as Pilot and Tugboat areas.
   c. Pilot Service, is the Company's Main Product or Service to serve ships entering and leaving the wharf through the Port channel, so that shipping navigation can be carried out safely, orderly, and smoothly for the safety of the ships and the environment.
   d. Other ship services, such as port utility & offshores, disposal, waste management.
2. Equipment Services, a Company business activity for supplying spare parts, repairing machines/ tools, as well as wholesale trading of machinery and equipment.
3. Port Services
   a. Dredging Services, a business activity of dredging shipping lanes, port pools and other locations that require dredging services, reclamation of dredged transportation, procurement/development of land and buildings and other related services.
   b. Utilities and Energy Provision Services, a Company business activity for providing clean water, electricity, and other related services.

Wilayah Operasional
Operational Areas

Per 31 Desember 2025, Pelindo memiliki 67 Pelabuhan yang berada di 4 regional, 32 Provinsi dan 4 Sub Holding.

December 31, 2025, Pelindo had 67 Ports in 4 Regionals, 32 Provinces and 4 Sub-Holdings.

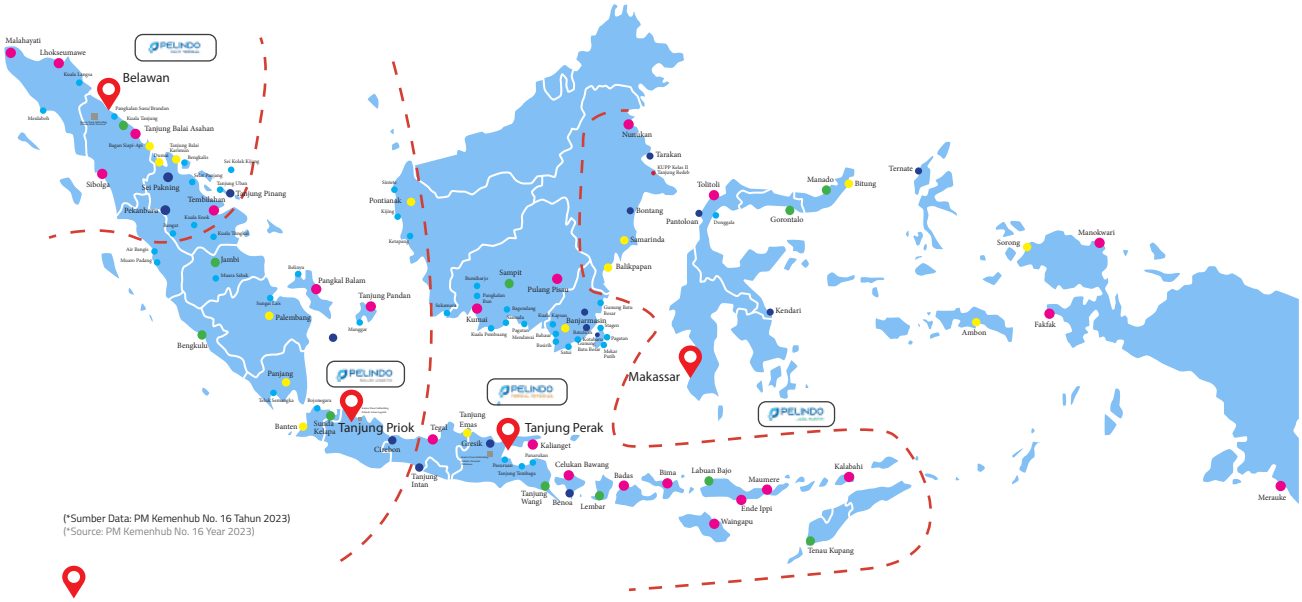

(*Sumber Data: PM Kemenhub No. 16 Tahun 2023)
(*Source: PM Kemenhub No. 16 Year 2023)

- Kantor Pusat *Subholding* / Subholding Headquarters
- Pelabuhan Kelas I* / Class I Port*
- Pelabuhan Kelas II* / Class II Port*
- Pelabuhan Kelas III* / Class III Port*
- Pelabuhan Kelas IV* / Class IV Port*
- KSOP Khusus dan KUPP Kelas II* / Specialized KSOP and KUPP Class II*
- Pelabuhan Kawasan / Regional Port
- Batas Wilayah Regional / Regional Boundary

Tabel Wilayah Usaha Pelindo
Pelindo Business Areas

Wilayah Region	**Cabang** Branches	**Kawasan** Remote Branches
Regional I	13	15
Regional II	12	20
Regional III	20	25
Regional IV	22	35

Daftar Keanggotaan Asosiasi
Association Membership List

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pelabuhan, Pelindo turut serta berperan aktif di dalam berbagai organisasi. Hingga akhir 2025, Pelindo tercatat sebagai anggota maupun kepengurusan dalam organisasi atau asosiasi sebagai berikut:

As a Company engaged in the port sector, Pelindo takes an active role in various organizations. At the end of 2025, Pelindo was listed as a member or management in the following organizations or associations:

Organisasi Organization	**Level** Level	**Peran/Dudukan** Role/Seat	**Manfaat Organisasi** Organization Benefits	***Annual Fee*** Annual Fee
International Association of Port and Harbors (IAPH)	Internasional International	• IAPH adalah organisasi non pemerintah yang merupakan aliansi pelabuhan global yang berkedudukan di Jepang dan beranggotakan 177 pelabuhan serta 147 bisnis terkait pelabuhan di 84 negara. • Pelindo adalah satu-satunya anggota IAPH dari Indonesia. • IAPH is a non-governmental organization as a global port alliance based in Japan consisting of 177 ports and 147 port-related businesses in 84 countries. • Pelindo is the only IAPH member from Indonesia.	• Mengetahui perkembangan dan teknologi pelabuhan terkini. • Mempromosikan perkembangan dan proyek-proyek Perseroan kepada dunia pelabuhan internasional. • Berperan aktif dalam pembahasan kerja sama lingkup *Asia Oceania*. • Partisipasi pada IAPH *World Port Conference* dan kegiatan-kegiatan turunan IAPH lainnya. • Understanding the latest port developments and technology. • Promoting the Company's developments and projects to the world of international ports. • Taking an active role in the discussion on cooperation within Asia Oceania. • Participating in the IAPH World Port Conference and other IAPH derivative activities.	USD7.615
ASEAN Port Association (APA)	Internasional International	• APA adalah asosiasi pelabuhan-pelabuhan di Asia Tenggara. • Keanggotaan Indonesia dalam APA terdaftar atas nama PT Pelabuhan Indonesia (Persero). • APA is an association of ports in Southeast Asia. • Indonesia's membership in APA is registered under the name of PT Pelabuhan Indonesia (Persero).	• Membuka peluang kerja sama dengan pengusaha bisnis pelabuhan dalam lingkup ASEAN. • Pertukaran informasi pelabuhan dengan pelabuhan ASEAN lainnya. • Berpartisipasi pada acara-acara asosiasi, seperti seminar dan acara keolahragaan. • Opening up opportunities for cooperation with port business entrepreneurs within ASEAN. • Exchanging port information with other ASEAN ports. • Participating in association events, such as seminars and sporting events.	USD5.000

PELINDO
PELINDO
PELINDO

Struktur Organisasi
Organizational Structure

Struktur organisasi Pelindo telah disahkan melalui Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor HK.01/10/10/2/PSOG/UTMA/PLND-25 Tanggal 10 Oktober 2025 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Struktur organisasi Pelindo per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

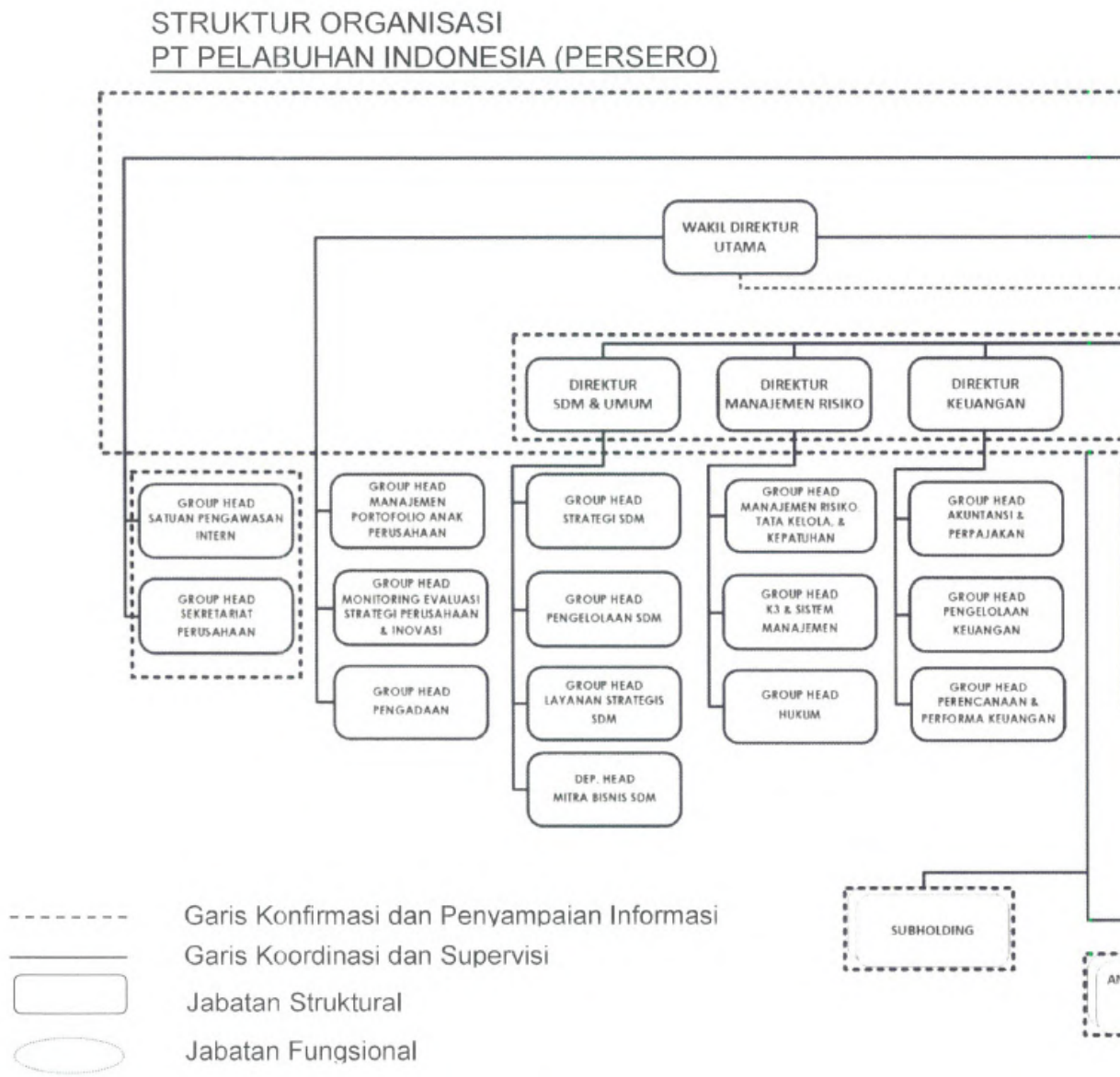

Pelindo's organizational structure has been ratified through the PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Regulation Nomor HK.01/10/10/2/PSOG/UTMA/PLND-25 Dated October 10, 2025 Concerning the Organizational Structure and Governance of PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Pelindo's organizational structure as of December

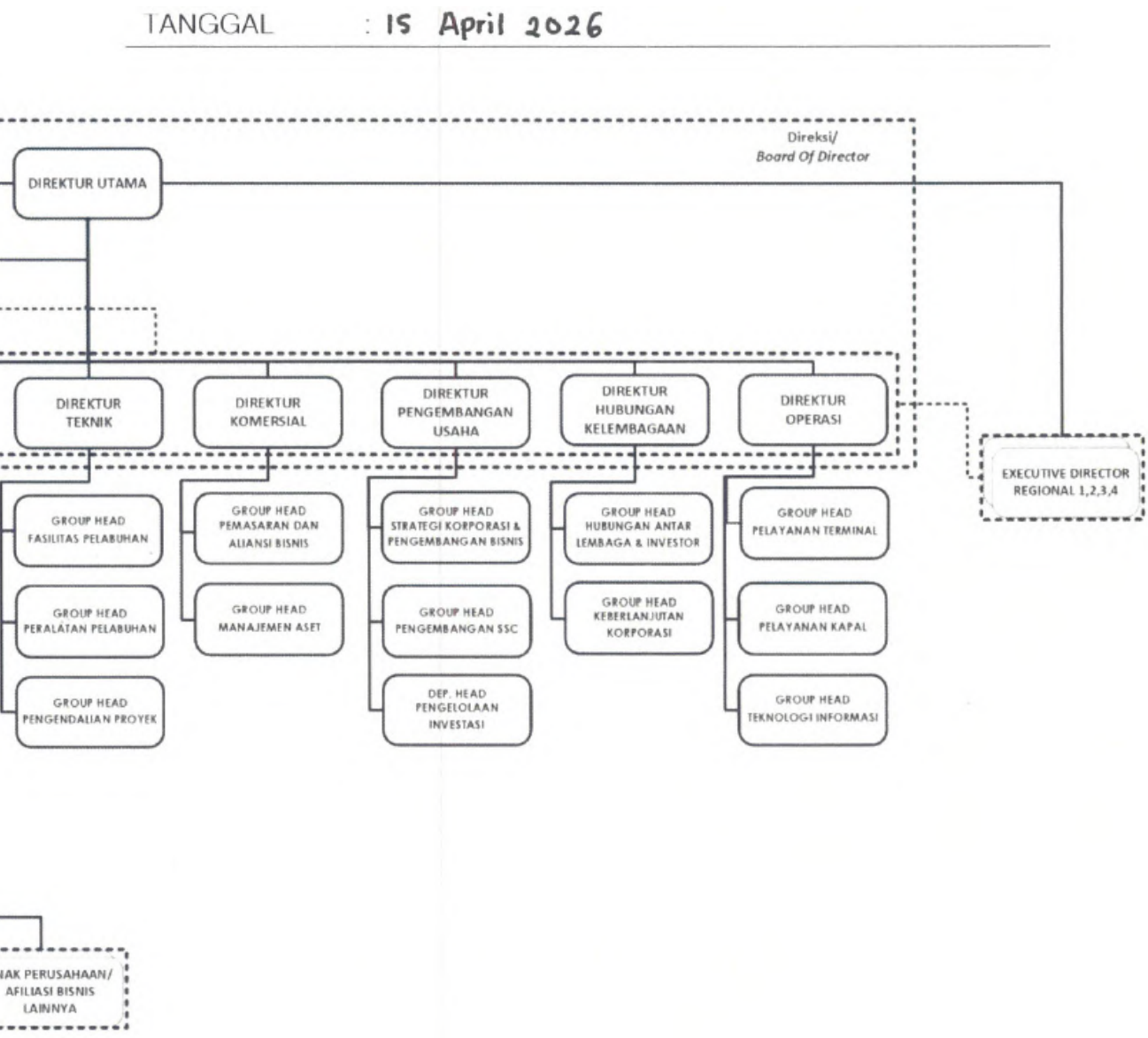

Profil Direksi
Board of Directors' Profiles

Februari 2026 – 2031 (Periode Pertama).
2026-2031 (First Term).

Warga Negara Indonesia
Indonesian

Jakarta, Indonesia
Jakarta, Indonesia

Lahir di Yogyakarta, pada tahun 1973. Usia 52 tahun Per Desember 2025.
Born in Yogyakarta in 1973. Age 52 as of December 2025.

Achmad Muchtasyar

Direktur Utama
President Director

Riwayat Pendidikan | Educational History

- S1 bidang Teknik Perminyakan dari Universitas Trisakti, Jakarta (1997).
- S2 bidang Teknik Industri dari Universitas of New Heaven, Amerika Serikat (2000).
- S1 bidang Ilmu Hukum dari Universitas Bhayangkara, Bekasi (2020).
- Program Profesi Insinyur dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta (2023).

- Bachelor's degree in Petroleum Engineering from Universitas Trisakti, Jakarta (1997).
- Master's degree in Industrial Engineering from the University of New Haven, USA (2000).
- Bachelor's degree in Law from Universitas Bhayangkara, Bekasi (2020).
- Professional Engineering Program from Universitas Gajah Mada, Yogyakarta (2023).

Sertifikasi | Certification

Sertifikasi Penguji Profesional Panitia Pengadaan.	Procurement Committee Professional Examiner Certification.

Riwayat Jabatan | Positions Held

Pengalaman Kerja | Work Experience

- Direktur Infrastruktur dan Teknologi PT PGN Tbk (Mei 2021-November 2023).
- Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM (Januari 2025-Februari 2025).
- Wakil Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga (Juli 2025-Februari 2026).
- Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2021-sekarang).

- Director of Infrastructure and Technology, PT PGN Tbk (May 2021-November 2023).
- Director General of Oil and Gas, Ministry of Energy and Mineral Resources (January 2025-February 2025).
- Deputy President Director, PT Pertamina Patra Niaga (July 2025-February 2026).
- President Director, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2021-present).

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis for Appointment

Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia Persero) berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia No. 131 Tahun 2026 No. SK-058/DI-DAM/DO/2026 Tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia.	Appointed for the first time as President Director of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) based on Shareholders' Decree No. 131 of 2026 and No. SK-058/DI-DAM/DO/2026 Concerning the Dismissal, Change of Position Nomenclature, Transfer of Duties, and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Jabatan Rangkap | Concurrent Positions

Beliau tidak memiliki rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik.	Does not hold any concurrent positions, either as a member of the Board of Directors, a member of the Board of Commissioners, and/or a member of a committee, or any other position within or outside the Issuer or Public Company.

Kepemilikan Saham | Share Ownership

Tidak memiliki.	Does not hold any shares in the Company.

2025 – 2030 (Periode Pertama).
February 2026-2031 (First Term).

Warga Negara Indonesia
Indonesian

Jakarta, Indonesia
Jakarta, Indonesia

Lahir di Purworejo, pada tahun 1979. Usia 46 tahun Per Desember 2025.
Born in Purworejo in 1979. Age 46 as of December 2025.

Drajat Sulistyo

Wakil Direktur Utama
Vice President Director

Riwayat Pendidikan | Educational History

- D3 bidang Teknik Sipil dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2002).
- S1 bidang Teknik Sipil dari Universitas Jakarta (2012).
- S2 bidang Logistic dari Kuehne Logistics University, Hamburg (2014).

- Diploma in Civil Engineering from Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2002).
- Bachelor's degree in Civil Engineering from Universitas Jakarta (2012).
- Master's degree in Logistics from Kuehne Logistics University, Hamburg (2014).

Sertifikasi | Certification

Certified Anti Fraud Governance (CAFG).

Riwayat Jabatan | Positions Held

Pengalaman Kerja | Work Experience

- *General Manager* Cabang Bengkulu PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Cabang Pelabuhan Bengkulu (1 September 2016-26 Februari 2018).
- *General Manager* Cabang Pelabuhan Panjang PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pelabuhan Panjang (27 Februari 2018-15 Juli 2020).
- Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok (15 Juli 2020-1 Oktober 2021).
- Direktur Utama PT Pelindo Multi Terminal (1 Oktober 2021-1 Maret 2023).
- Komisaris Utama PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (13 April 2022-17 Juni 2025).
- Executive Director 2 Pelindo Regional 2 (1 Maret 2023-24 Juni 2025).
- Direktur Strategi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2025).
- Direktur Komersial PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2025-2026).
- Wakil Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2026-sekarang).

- General Manager of the Bengkulu Branch, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Bengkulu Port Branch (September 1, 2016–February 26, 2018).
- General Manager of the Panjang Port Branch, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Panjang Port Branch (February 27, 2018–July 15, 2020).
- President Director, PT Pelabuhan Tanjung Priok (July 15, 2020–October 1, 2021).
- President Director, PT Pelindo Multi Terminal (October 1, 2021–March 1, 2023).
- President Commissioner, PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (April 13, 2022–June 17, 2025).
- Executive Director 2, Pelindo Regional 2 (March 1, 2023–June 24, 2025).
- Strategy Director, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2025).
- Commercial Director, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2025–2026).
- Vice President Director, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2026-present).

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis for Appointment

Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Direktur Strategi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-168/MBU/06/2025 dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danantara Asset Management Nomor: SK.024/DI-DAM/DO/2025 tanggal 25 Juni 2025. Diangkat sebagai Direktur Komersial berdasarkan berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-264/MBU/09/2025 dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danantara Asset Management Nomor: SK.059/DI-DAM/DO/2025 tanggal 19 September 2025. Diangkat sebagai Wakil Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia Persero) berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia No. 131 Tahun 2026 No. SK-058/DI-DAM/DO/2026 Tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia.

Appointed for the first time as Strategy Director of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) based on the Minister of State-Owned Enterprises Decree Number: SK-168/MBU/06/2025, and President Director of PT Danantara Asset (Persero) Decree Number: SK.024/DI-DAM/DO/2025 dated June 25, 2025. Appointed as Commercial Director based on the Minister of State-Owned Enterprises Decree Number: SK-264/MBU/09/2025 and President Director of PT Danantara Asset (Persero) Decree Number: SK.059/DI-DAM/DO/2025 dated September 19, 2025. Appointed as Vice President Director of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) based on the PT Danantara Asset (Persero) Shareholders Decree and No. 131 of 2026 Minister of Finance Decree No. No. SK-058/DI-DAM/DO/2026 concerning the Dismissal, Change of Position Nomenclature, Transfer of Duties, and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Jabatan Rangkap | Concurrent Positions

Beliau tidak memiliki rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik.

Does not hold any concurrent positions, either as a member of the Board of Directors, a member of the Board of Commissioners, and/or a member of a committee, or any other position within or outside the Issuer or Public Company.

Kepemilikan Saham | Share Ownership

Tidak memiliki.

Does not hold any shares in the Company.

Oktober 2021 – 2026 (Periode Pertama).
October 2021 – 2026 (First Term).

Warga Negara Indonesia
Indonesian

Jakarta, Indonesia
Jakarta, Indonesia

Lahir di Surabaya, pada tahun 1973. Usia 52 tahun Per Desember 2025.
Born in Surabaya in 1973. Age 52 as of December 2025.

Boy Robyanto

Direktur Manajemen Risiko
Risk Management Director

Riwayat Pendidikan | Educational History

- D3 bidang Teknik Sipil dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (1994).
- S1 bidang Teknik Sipil dari Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin (2002).
- S2 bidang Manajemen dari Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta (2019).
- S2 Program Profesi Insinyur Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (2021).

- D3 Diploma in Civil Engineering from Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (1994).
- Bachelor's degree in Civil Engineering from Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin (2002).
- Master's degree in Management from Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta (2019).
- Master of Professional Engineering Program, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, (2021).

Sertifikasi | Certification

- *Qualified Risk Governance Professional*
- *Certification in Audit Committee*

Riwayat Jabatan | Positions Held

Pengalaman Kerja | Work Experience

- ASM Rancang Bangun Kontruksi Sipil PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2014-2015).
- ASM Rancang Bangun PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2014-2015).
- ASM Perencanaan Teknik PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2015-2016).
- *General Manager* PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tenau Kupang (2016-2017).
- SVP *Port Facility* PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2017-2018).
- Komisaris PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (2017-2020).
- CEO Regional Kalimantan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2018-2020).
- Direktur Teknik PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2020).
- Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2021).
- Direktur Investasi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2021-2025).
- Direktur Manajemen Risiko PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2025-sekarang).

- ASM Civil Construction Design, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2014-2015).
- ASM Design, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2014-2015).
- ASM Technical Planning, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2015-2016).
- General Manager, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Tenau Kupang Branch (2016-2017).
- SVP Port Facility PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2017-2018).
- Commissioner, PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (2017-2020).
- CEO Regional Kalimantan, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2018-2020).
- Technical Director, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2020).
- President Director, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2021).
- Investment Director, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2021-present).
- Director of Risk Management, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2025-present).

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis for Appointment

Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Direktur Investasi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor SK-334/MBU/10/2021 tanggal 1 Oktober 2021 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II. Diangkat sebagai Direktur Manajemen Risiko berdasarkan berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-264/MBU/09/2025 dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danantara Asset Management Nomor: SK.059/DI-DAM/DO/2025 tanggal 19 September 2025.

Appointed for the first time as Investment Director of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) based on the Minister of SOEs Decree as the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. SK-334/MBU/10/2021 dated October 1, 2021, concerning the Dismissal, Change of Position Nomenclature, and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Appointed as Risk Management Director based on the Minister of SOEs Decree No. SK-264/MBU/09/2025 and President Director of PT Danantara Asset Management (Persero) No. SK.059/DI-DAM/DO/2025 dated September 19, 2025.

Jabatan Rangkap | Concurrent Positions

Beliau tidak memiliki rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik.

Does not hold any concurrent positions, including as a member of the Board of Directors, a member of the Board of Commissioners, and/or a member of a committee, or any other positions within or outside the Issuer or Public Company.

Kepemilikan Saham | Share Ownership

Tidak memiliki.

Does not hold any shares in the Company.

2025 – 2030 (Periode Pertama).
2025 – 2030 (First Term).

Warga Negara Indonesia
Indonesian

Jakarta, Indonesia
Jakarta, Indonesia

Lahir di Jakarta, pada tahun 1975. Usia 50 tahun Per Desember 2025.
Born in Jakarta in 1975. Age 50 as of December 2025.

Dwi Fatan Lilyana

Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum
Human Resources and General Affairs Director

Riwayat Pendidikan | Educational History

• S1 bidang Akuntansi dari Universitas Indonesia (2000).	• Bachelor's degree in Accounting from Universitas Indonesia (2000).

Sertifikasi | Certification

-

Riwayat Jabatan | Positions Held

Pengalaman Kerja | Work Experience

• VP *Corporate Program* PT Pupuk Indonesia (1 Maret 2016 – 31 Desember 2016). • VP *Learning and Development* PIHC PT Pupuk Indonesia (1 Januari 2017 – 31 Juli 2018). • Kepala Divisi *Human Capital Strategy* PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) (1 Agustus 2018 – 12 April 2021). • SEVP Sumber Daya Manusia PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) (1 November 2020 – 12 April 2021). • Direktur Sumber Daya Manusia PT Bukit Asam Tbk (12 April 2021 – 23 Desember 2021). • Direktur SDM, Pendidikan dan Penelitian RS Cipto Mangunkusumo (15 Mei 2023 – 25 Juni 2025). • Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2025-sekarang).	• VP of Corporate Programs at PT Pupuk Indonesia (March 1, 2016 – December 31, 2016). • VP of Learning and Development at PIHC at PT Pupuk Indonesia (January 1, 2017 – July 31, 2018). • Head of the Human Capital Strategy Division at PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) (August 1, 2018 – April 12, 2021). • SEVP of Human Resources at PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) (November 1, 2020 – April 12, 2021). • Director of Human Resources at PT Bukit Asam Tbk (April 12, 2021 – December 23, 2021). • Director of Human Resources, Education, and Research at Cipto Mangunkusumo Hospital (May 15, 2023 – June 25, 2025). • Human Resources and General Affairs Director at PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2025-present).

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis for Appointment

Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum PT Pelabuhan Indonesia (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-168/MBU/06/2025 Dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danantara Asset Management Nomor: SK.024/DI-DAM/DO/2025 tanggal 25 Juni 2025.	Appointed for the first time as Human Resources and General Affairs Director of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) based on the Minister of SOEs Decree No. SK-168/MBU/06/2025 and President Director of PT Danantara Asset Management (Persero) Number: SK.024/DI-DAM/DO/2025 dated June 25, 2025.

Jabatan Rangkap | Concurrent Positions

Beliau tidak memiliki rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik.	Does not hold any concurrent positions, either as a member of the Board of Directors, a member of the Board of Commissioners, and/or a member of a committee, or any other position within or outside the Issuer or Public Company.

Kepemilikan Saham | Share Ownership

Tidak memiliki.	Does not hold any shares in the Company.

2025 – 2030 (Periode Pertama).
2025–2030 (First Term).

Warga Negara Indonesia
Indonesian

Jakarta, Indonesia
Jakarta, Indonesia

Lahir di Bandung, pada tahun 1966. Usia 60 tahun Per Desember 2025.
Born in Bandung in 1966. Age 60 as of December 2025.

Bachtiar Soeria Atmadja

Direktur Keuangan
Direktur Keuangan

Riwayat Pendidikan | Educational History

- S1 bidang Teknik Perminyakan dari Universitas Trisakti, Jakarta (1991).
- S2 Teknik Perminyakan dari University of Tulsa, Oklahoma (1994).

- Bachelor's degree in Petroleum Engineering from Universitas Trisakti, Jakarta (1991).
- Master's degree in Petroleum Engineering from the University of Tulsa, Oklahoma (1994).

Sertifikasi | Certification

Qualified Risk Governance Professional (QRGP).

Riwayat Jabatan | Positions Held

Pengalaman Kerja | Work Experience

- *Vice President* Maybank Indonesia (2011–2015)
- *Senior Vice* President ICBC Indonesia (2015–2021).
- Presiden Direktur BPR Universal (2021).
- Direktur Keuangan PT Elnusa Tbk (2021–2024).
- Komisaris Utama PT Elnusa Petrofin (2022–2024).
- Presiden Direktur PT Elnusa Tbk (2024–2025).
- Direktur Keuangan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2025-sekarang).

- Vice President, Maybank Indonesia (2011–2015)
- Senior Vice President, ICBC Indonesia (2015–2021).
- President Director, BPR Universal (2021).
- Finance Director, PT Elnusa Tbk (2021–2024).
- President Commissioner, PT Elnusa Petrofin (2022–2024).
- President Director, PT Elnusa Tbk (2024–2025).
- Finance Director, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2025–present).

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis for Appointment

Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Direktur Keuangan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-264/MBU/09/2025 Dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danantara Asset Management Nomor: SK.059/DI-DAM/DO/2025 tanggal 19 September 2025.

Appointed for the first time as Finance Director of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) based on the Minister of State-Owned Enterprises Decree Number: SK-264/MBU/09/2025, and President Director of PT Danantara Asset Decree Number: SK.059/DI-DAM/DO/2025 dated September 19, 2025.

Jabatan Rangkap | Concurrent Positions

Beliau tidak memiliki rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik.

Does not hold any concurrent positions, either as a member of the Board of Directors, a member of the Board of Commissioners, and/or a member of a committee, or any other position within or outside the Issuer or Public Company.

Kepemilikan Saham | Share Ownership

Tidak memiliki.

Does not hold any shares in the Company.

2025 – 2030 (Periode Pertama).
2025 – 2030 (First Term).

Warga Negara Indonesia
Indonesian

Jakarta, Indonesia
Jakarta, Indonesia

Lahir di Jakarta, pada tahun 1970. Usia 55 tahun Per Desember 2025.
Born in Jakarta in 1970. Age 55 as of December 2025.

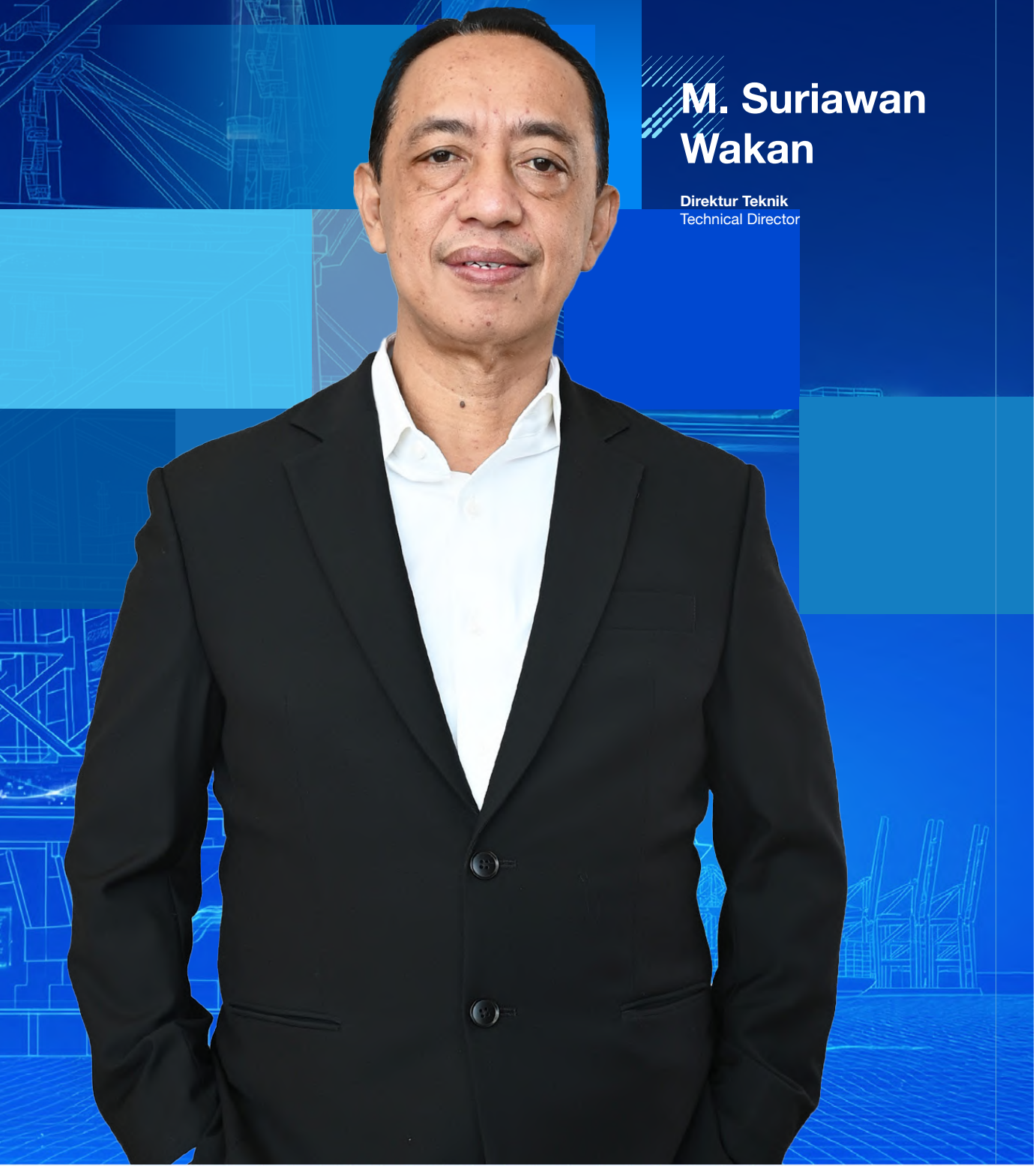

M. Suriawan Wakan

Direktur Teknik
Technical Director

Riwayat Pendidikan | Educational History

- S1 bidang Teknik Elektro dari Universitas Mercu Buana, Jakarta (2014).
- S2 bidang Manajemen Keuangan dari Universitas Esa Unggul, Jakarta (2021).

- Bachelor's degree in Electrical Engineering from Universitas Mercu Buana, Jakarta (2014).
- Master's degree in Financial Management from Universitas Esa Unggul, Jakarta (2021).

Sertifikasi | Certification

- *Qualified Risk Governance Professional* (QRGP).

Riwayat Jabatan | Positions Held

Pengalaman Kerja | Work Experience

- *Executive General Manager* (Kepala Cabang) Bandara Soekarno-Hatta sekaligus Komisaris PT Angkasa Pura Solusi Integra (2 Oktober 2017).
- *Executive General Manager of Airport Construction Division* PT Angkasa Pura II (1 Juli 2019).
- Direktur Utama PT Gapura Angkasa (3 Juli 2023).
- Direktur Teknik PT Angkasa Pura Indonesia (27 Desember 2023 – 16 Mei 2025).
- Direktur Teknik PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2025-sekarang).

- Executive General Manager (Branch Head) at Soekarno-Hatta Airport and Commissioner at PT Angkasa Pura Solusi Integra (October 2, 2017).
- Executive General Manager of the Airport Construction Division at PT Angkasa Pura II (July 1, 2019).
- President Director at PT Gapura Angkasa (July 3, 2023).
- Technical Director at PT Angkasa Pura Indonesia (December 27, 2023 – May 16, 2025).
- Technical Director at PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2025-present).

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis for Appointment

Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Direktur Keuangan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-264/MBU/09/2025 Dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danantara Asset Management Nomor: SK.059/DI-DAM/DO/2025 tanggal 19 September 2025.

Appointed for the first time as Finance Director of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) based on the Minister of SOEs Decree No. SK-264/MBU/09/2025 and President Director of PT Danantara Asset Management (Persero) No. SK.059/DI-DAM/DO/2025 dated September 19, 2025.

Jabatan Rangkap | Concurrent Positions

Beliau tidak memiliki rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik.

Does not hold any concurrent positions, including as a member of the Board of Directors, a member of the Board of Commissioners, and/or a member of a committee, or any other positions within or outside the Issuer or Public Company.

Kepemilikan Saham | Share Ownership

Tidak memiliki.

Does not hold any shares in the Company.

2026 – 2031 (Periode Pertama).
2026 – 2031 (First Term).

Warga Negara Indonesia
Indonesian

Jakarta, Indonesia
Jakarta, Indonesia

Lahir di Saparua, pada tahun 1969. Usia 56 tahun Per Desember 2025.
Born in Saparua in 1969. Age 56 as of December 2025.

Farid Padang

Direktur Komersial
Commercial Director

Riwayat Pendidikan | Educational History

- S1 bidang Arsitek Angkatan Laut dari Universitas Pattimura, Maluku (1995).
- S2 bidang Manajemen Keuangan dari STIE Makassar (2012).
- S2 bidang Manajemen Strategi dari Univesitas Hasanuddin, Makassar (2013).
- S2 bidang Teknik Sipil dari Universitas Hasanuddin, Makassar (2018).

- Bachelor's degree in Naval Architecture from Universitas Pattimura, Maluku (1995).
- Master's degree in Financial Management from STIE Makassar (2012).
- Master's degree in Strategic Management from Universitas Hasanuddin, Makassar (2013).
- Master's degree in Civil Engineering from Universitas Hasanuddin, Makassar (2018).

Sertifikasi | Certification

-

Riwayat Jabatan | Positions Held

Pengalaman Kerja | Work Experience

- *General Manager* Direktur Pelaksanaa PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) (2016).
- Direktur Teknik PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) (2016-2018).
- Direktur Pelaksanaa PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) (2018-2020).
- Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) (2018-2020).
- Direktur Komersial PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2026-sekarang).

- General Manager, Executive Director, PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) (2016).
- Technical Director, PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) (2016-2018).
- Executive Director, PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) (2018-2020).
- President Director, PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) (2018-2020).
- Commercial Director, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2026-present).

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis for Appointment

Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Direktur Komersial PT Pelabuhan Indonesia (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-264/MBU/09/2025 dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danantara Asset Management Nomor: SK.059/DI-DAM/DO/2025 tanggal 19 September 2025.

Appointed for the first time as Commercial Director of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) based on the Minister of State-Owned Enterprises Decree Number: SK-264/MBU/09/2025, and President Director of PT Danantara Asset Decree Number: SK.059/DI-DAM/DO/2025 dated September 19, 2025.

Jabatan Rangkap | Concurrent Positions

Beliau tidak memiliki rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik.

Does not hold any concurrent positions, either as a member of the Board of Directors, a member of the Board of Commissioners, and/or a member of a committee, or any other position within or outside the Issuer or Public Company.

Kepemilikan Saham | Share Ownership

Tidak memiliki.

Does not hold any shares in the Company.

Oktober 2021 – 2025 (Periode Pertama).
ctober 2021 – 2025 (First Term).

Warga Negara Indonesia
Indonesian

Jakarta, Indonesia
Jakarta, Indonesia

Lahir di Mojokerto, pada tahun 1970. Usia 55 tahun Per Desember 2025.
Born in Mojokerto in 1969. Age 56 as of December 2025.

Prasetyo

Direktur Pengembangan Usaha
Business Development Director

Riwayat Pendidikan | Educational History

- S1 bidang Teknik Arsitektur dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (1994).
- S2 bidang Bussiness Administration dari Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung (2019).

- Bachelor's degree in Architectural Engineering from Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya (1994).
- Master's degree in Business Administration from Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung (2019).

Sertifikasi | Certification

- *Qualified Risk Governance Professional (2023).*
- *Certification in Audit Committee (2024).*

Riwayat Jabatan | Positions Held

Pengalaman Kerja | Work Experience

- *Manager* Teknik Cabang Gresik di PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2009-2010).
- *Assistant Senior Manager* Perencanaan Usaha (2010-2011).
- *Assistant Senior Manager* Pemeliharaan Bangunan (2011).
- *Assistant* Kepala Biro Perencanaan (2011-2013).
- *General Manager* Pelabuhan Benoa (2013).
- *Senior Manager* Supervisi Teknik (2013-2014).
- Direktur Utama PT Pelindo Properti Indonesia (2014-2017).
- Kepala Biro Perencanaan Strategis dan Kinerja Korporat (2017-2020).
- Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2020-2021).
- Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2021).
- Direktur Strategi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2021-2025).

- Technical Manager of the Gresik Branch at PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2009-2010).
- Senior Assistant Manager of Business Planning (2010-2011).
- Senior Assistant Manager of Building Maintenance (2011).
- Assistant Head of the Planning Bureau (2011-2013).
- General Manager of Benoa Port (2013).
- Senior Manager of Technical Supervision (2013-2014).
- President Director at PT Pelindo Properti Indonesia (2014-2017).
- Head of the Strategic Planning and Corporate Performance Bureau (2017-2020).
- Director of Transformation and Business Development at PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2020-2021).
- President Director at PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2021).
- Strategy Director at PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2021-2025).

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis for Appointment

Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Direktur Strategi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor SK-334/MBU/10/2021 tanggal 1 Oktober 2021 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II.

Appointed for the first time as Strategy Director of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) based on the Minister of SOEs Decree as the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. SK-334/MBU/10/2021 dated October 1, 2021, concerning the Dismissal, Change of Position Nomenclature, and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Jabatan Rangkap | Concurrent Positions

Beliau tidak memiliki rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik.

Does not hold any concurrent positions, including as a member of the Board of Directors, a member of the Board of Commissioners, and/or a member of a committee, or any other positions within or outside the Issuer or Public Company.

Kepemilikan Saham | Share Ownership

Tidak memiliki.

Does not hold any shares in the Company.

2026 – 2031 (Periode Pertama).
2026 – 2031 (First Term).

Warga Negara Indonesia
Indonesian

Bekasi, Indonesia
Bekasi, Indonesia

Lahir di Deli Serdang, pada tahun 1974.
Usia 51 tahun Per Desember 2025.
Born in Deli Serdang in 1974. Age 51 as of December 2025.

Hendri Ginting

Direktur Hubungan Kelembagaan
Business Development Director

Riwayat Pendidikan | Educational History

- D3 Nautika dari Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta (1998).
- S1 Ahli Nautika Tingkat I dari Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta (2002).
- S2 bidang Manajemen dari Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen LPMI, Jakarta (2008).

- Diploma in Nautical Studies from Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, Jakarta (1998).
- Bachelor's Degree in Nautical Studies from Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, Jakarta (2002).
- Master's Degree in Management from Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen LPMI, Jakarta (2008).

Sertifikasi | Certification

-

Riwayat Jabatan | Positions Held

Pengalaman Kerja | Work Experience

- Direktur Lalu Lintas dan Angkatan Laut, Kementerian Perhubungan RI (2022-2024).
- Direktur Perkapalan dan Kelautan, Kementerian Perhubungan RI (2024-2025).
- Direktur Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran, Kementerian Perhubungan RI (2024-2026).
- Direktur Hubungan Kelembagaan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2026-sekarang).

- Director of Traffic and Naval Affairs, Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia (2022-2024).
- Director of Shipping and Maritime Affairs, Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia (2024-2025).
- Director of the Maritime and Shipping Surveillance Unit, Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia (2024-2026).
- Institutional Relations Director, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2026-present).

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis for Appointment

Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Direktur Hubungan Kelembagaan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-264/MBU/09/2025 dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danantara Asset Management Nomor: SK.059/DI-DAM/DO/2025 tanggal 19 September 2025.

Appointed for the first time as Institutional Relations Director of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) based on the Minister of State-Owned Enterprises Decree Number: SK-264/MBU/09/2025, and President Director of PT Danantara Asset Decree Number: SK.059/DI-DAM/DO/2025 dated September 19, 2025.

Jabatan Rangkap | Concurrent Positions

Beliau tidak memiliki rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik.

Does not hold any concurrent positions, either as a member of the Board of Directors, a member of the Board of Commissioners, and/or a member of a committee, or any other position within or outside the Issuer or Public Company.

Kepemilikan Saham | Share Ownership

Tidak memiliki.

Does not hold any shares in the Company.

2026 – 2031 (Periode Pertama).
2026-2031 (First Term).

Warga Negara Indonesia
Indonesian

Bekasi, Indonesia
Bekasi, Indonesia

Lahir di Bandung, pada tahun 1969. Usia 56 tahun Per Desember 2025.
Born in Bandung in 1969. Age 56 as of December 2025.

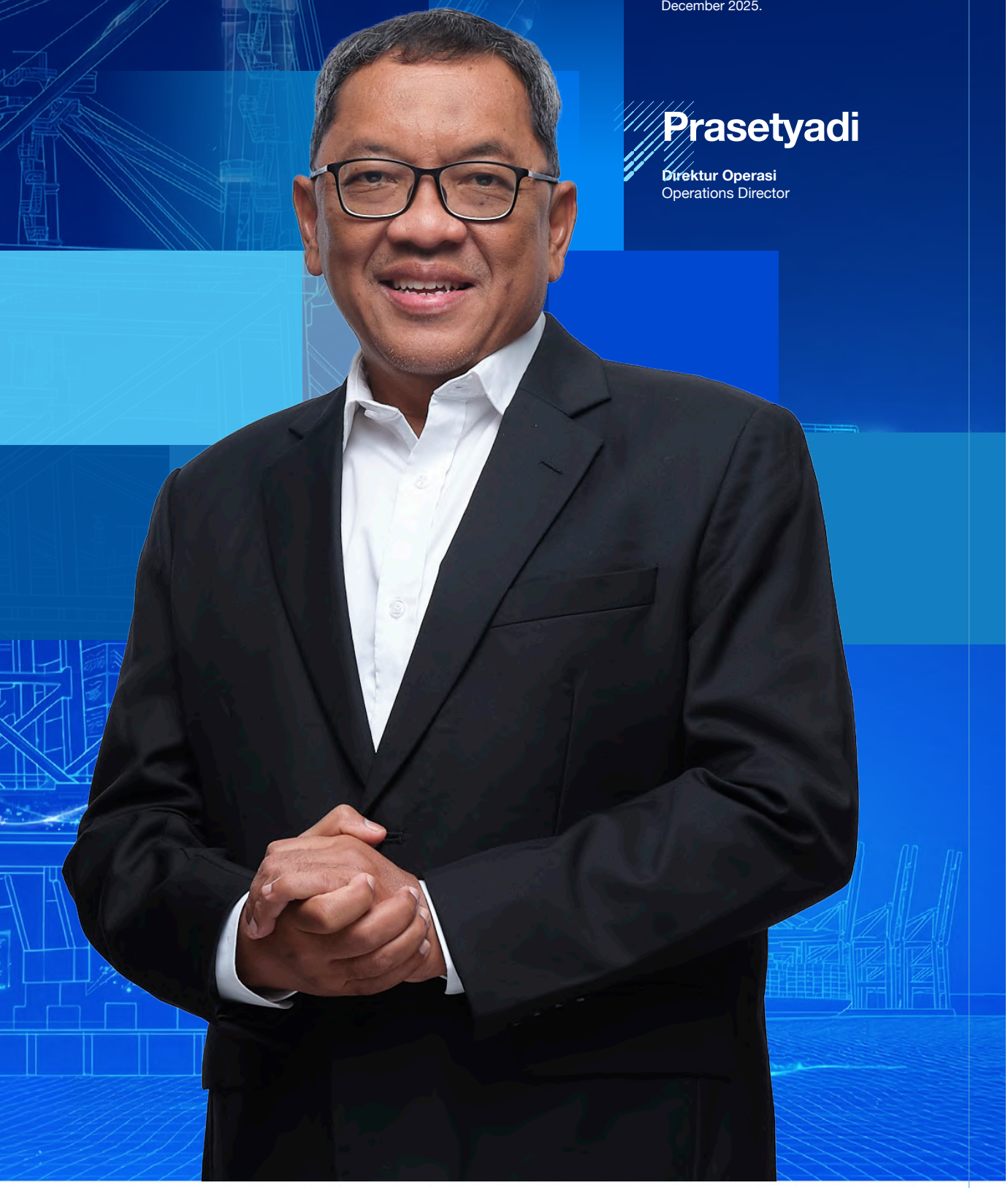

Prasetyadi

Direktur Operasi
Operations Director

Riwayat Pendidikan | Educational History

- S1 bidang Teknik Mesin dari Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya (1993).
- S2 bidang Port and Coastal Engineering dari Universitas Le Havre, Prancis (1998).
- S2 bidang Magister Manajemen dari Universitas Airlangga, Surabaya (2015).

- Bachelor's degree in Mechanical Engineering from Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya (1993).
- Master's degree in Port and Coastal Engineering from the University of Le Havre, France (1998).
- Master's degree in Management from Universitas Airlangga, Surabaya (2015).

Sertifikasi | Certification

-

Riwayat Jabatan | Positions Held

Pengalaman Kerja | Work Experience

- Direktur Operasi dan Sistem Informasi PT Pelabuhan Indonesia II (Mei 2016-Maret 2020).
- Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia IV (April 2020-Oktober 2021).
- Direktur Utama PT Pelindo Jasa Maritim (Oktober 2021-Maret 2024).
- Direktur Operasi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2026-sekarang).

- Director of Operations and Information Systems, PT Pelabuhan Indonesia II (May 2016-March 2020).
- President Director, PT Pelabuhan Indonesia IV (April 2020-October 2021).
- President Director, PT Pelindo Jasa Maritim (October 2021-March 2024).
- Operations Director, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2026-present).

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis for Appointment

Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Direktur Operasi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-264/MBU/09/2025 dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danantara Asset Management Nomor: SK.059/DI-DAM/DO/2025 tanggal 19 September 2025.

Appointed for the first time as Operations Director of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) based on Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number: SK-264/MBU/09/2025 and President Director of PT Danantara Asset Management Number: SK.059/DI-DAM/DO/2025 dated September 19, 2025.

Jabatan Rangkap | Concurrent Positions

Beliau tidak memiliki rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik.

Does not hold any concurrent positions, either as a member of the Board of Directors, a member of the Board of Commissioners, and/or a member of a committee, or any other position within or outside the Issuer or Public Company.

Kepemilikan Saham | Share Ownership

Tidak memiliki.

Does not hold any shares in the Company.

- Maret 2020 – Februari 2024 (Periode Pertama).
- 16 Februari 2024 – 2029 (Periode Kedua).
- March 2020 – February 2024 (First Term).
- February 16, 2024 – 2029 (Second Term).

Warga Negara Indonesia
Indonesian

Jakarta, Indonesia
Jakarta, Indonesia

Lahir di Banyumas, pada tahun 1970. Usia 55 tahun Per Desember 2025.
Born in Banyumas in 1970. Age 55 as of December 2025.

Arif Suhartono*

Direktur Utama
President Director

Riwayat Pendidikan | Educational History

- S1 bidang Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung (1994).
- S2 bidang *Infrastructure* Management dari Yokohama National University Jepang (2001).
- S2 bidang *Business Administration* dari Nanyang Technological University Singapura (2017).

- Bachelor's degree in Civil Engineering from Institut Teknologi Bandung (1994).
- Master's degree in Infrastructure Management from Yokohama National University, Japan (2001).
- Master's degree in Business Administration from Nanyang Technological University, Singapore (2017).

Sertifikasi | Certification

- *Qualified Risk Governance Professional*
- *Certification in Audit Committee*

Riwayat Jabatan | Positions Held

Pengalaman Kerja | Work Experience

- Direktur Operasi PT Multi Terminal Indonesia (2010-2012).
- Direktur Komersial PT Multi Terminal Indonesia (2012-2013).
- Direktur Utama PT Terminal Peti Kemas Indonesia (2013-2014).
- Pj. PMO *Leader* PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)/IPC (2014).
- Direktur Utama Rukindo PT Pengerukan Indonesia (2014-2015).
- Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok (2015-2017).
- Direktur Utama PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (2017-2019).
- Direktur Komersial PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2019-2020).
- Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2020 - 2021).
- Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2021-sekarang).

- Operations Director at PT Multi Terminal Indonesia (2010-2012).
- Commercial Director at PT Multi Terminal Indonesia (2012-2013).
- President Director at PT Terminal Petikemas Indonesia (2013-2014).
- Acting PMO Leader at PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)/IPC (2014).
- President Director at Rukindo PT Pengerukan Indonesia (2014-2015).
- President Director at PT Pelabuhan Tanjung Priok (2015-2017).
- President Director at PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (2017-2019).
- Commercial Director at PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2019-2020).
- President Director at PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2020 - 2021).
- President Director at PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2021-present).

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis for Appointment

Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II Persero) berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor SK-69/MBU/03/2020 tanggal 2 Maret 2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota – Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II. Kemudian diangkat kembali sebagai Direktur Utama berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia Nomor SK-39/MBU/02/2024 tanggal 16 Februari 2024.

Appointed for the first time as President Director of PT Pelabuhan Indonesia II Persero) based on the Minister of State-Owned Enterprises at the General Meeting of Shareholders of the Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Decree Number SK-69/MBU/03/2020 dated March 2, 2020 concerning Dismissal, Changes in Position Nomenclature, Transfer of Duties and Appointment of Members of the Board of Directors of the Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II. Then reappointed as President Director based on the Minister of State-Owned Enterprises at the General Meeting of Shareholders of the Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Decree Number SK-39/MBU/02/2024 dated February 16, 2024.

Jabatan Rangkap | Concurrent Positions

Beliau tidak memiliki rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik.

Does not hold any concurrent positions, including as a member of the Board of Directors, a member of the Board of Commissioners, and/or a member of a committee, or any other positions within or outside the Issuer or Public Company.

Kepemilikan Saham | Share Ownership

Tidak memiliki.

Does not hold any shares in the Company.

*Berhenti menjabat sejak 20 Februari 2026.
*Retired from office on 20 February 2026.

Oktober 2021 – 2026 (Periode Pertama).
October 2021 – 2026 (First Term).

Warga Negara Indonesia
Indonesian

Jakarta, Indonesia
Jakarta, Indonesia

Lahir di Magetan, pada tahun 1969. Usia 56 tahun Per Desember 2025.
Born in Magetan in 1969. Age 56 as of December 2025.

Putut Sri Muljanto*

Direktur Operasi merangkap Plt. Direktur Pengembangan Usaha
Operations Director and Acting Business Development Director

Riwayat Pendidikan | Educational History

- S1 bidang Ekonomi Manajemen dari Universitas Airlangga Surabaya (1993).
- S2 bidang Manajemen dari Universitas Airlangga Surabaya (2012).

- Bachelor's degree in Economic Management from Universitas Airlangga Surabaya (1993).
- Master's degree in Management from Universitas Airlangga Surabaya (2012).

Sertifikasi | Certification

- *Qualified Risk Governance Professional (2023).*
- *Certification in Audit Committee (2024).*

Riwayat Jabatan | Positions Held

Pengalaman Kerja | Work Experience

- Pjs. Senior Manajer Peningkatan Usaha Pelindo III (2009 - 2010).
- *Senior Manager* Peningkatan Usaha Pelindo III (2010 - 2011).
- *Senior Manager* Pemasaran Pelindo III (2011 - 2013).
- Komisaris PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (2012 - 2013).
- Direktur Utama PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (2013 - 2018).
- Komisaris PT Berlian Manyar Sejahtera (2014 - 2017).
- Komisaris PT Berkah Industri Mesin Angkat (2017 - 2018).
- Direktur Utama PT Pelindo Marine Service (2018).
- SVP *Marketing* Pelindo III (2018).
- Direktur Utama PT Terminal Petikemas Surabaya (2018).
- Komisaris PT Pelindo Husada Citra (2018).
- ASM Perencanaan dan Kerjasaman Usaha Pelindo III (2018 - 2019).
- Komisaris Utama PT Pelindo Daya Sejahtera (2018-Sekarang).
- Komisaris Utama PT Berkah Multi Cargo (2018-Sekarang).
- Direktur Operasi dan Komersial PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2018-2021).
- Direktur Pengelola PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2021-2025).
- Direktur Operasi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2025-sekarang).
- Plt. Direktur Pengembangan Usaha PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2025-sekarang).

- Acting Business Development Senior Manager at Pelindo III (2009 - 2010).
- Senior Business Development Manager at Pelindo III (2010 - 2011).
- Senior Marketing Manager at Pelindo III (2011 2013).
- Commissioner at PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (2012 - 2013).
- President Director at PT Berlian Jasa Terminal Indonesia (2013 - 2018).
- Commissioner at PT Berlian Manyar Sejahtera (2014 - 2017).
- Commissioner at PT Berkah Industri Lifting Machinery (2017 - 2018).
- President Director at PT Pelindo Marine Service (2018).
- SVP Marketing at Pelindo III (2018).
- President Director at PT Terminal Petikemas Surabaya (2018).
- Commissioner at PT Pelindo Husada Citra (2018).
- ASM Business Planning and Cooperation at Pelindo III (2018 - 2019).
- President Commissioner at PT Pelindo Daya Sejahtera (2018-Present).
- President Commissioner at PT Berkah Multi Cargo (2018-Present).
- Operations and Commercial Director at PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2018- 2021).
- Managing Director at PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2021-2025).
- Operations Director at PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2025-present).
- Acting Business Development Director at PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2025-present).

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis for Appointment

Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Direktur Pengelola PT Pelabuhan Indonesia (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II Nomor SK-334/MBU/10/2021 tanggal 1 Oktober 2021 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II. Diangkat sebagai Direktur Operasi berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-264/MBU/09/2025 dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danantara Asset Management Nomor: SK.059/DI-DAM/DO/2025 tanggal 19 September 2025.

Appointed for the first time as Managing Director of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) based on Minister of SOEs Decree as the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No. SK-334/MBU/10/2021 dated October 1, 2021, concerning the Dismissal, Change of Position Nomenclature, and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Appointed as Operations Director based on Minister of SOEs Decree No. SK-264/MBU/09/2025 and President Director of PT Danantara Asset Management (Persero) Np. SK.059/DI-DAM/DO/2025 dated September 19, 2025.

Jabatan Rangkap | Concurrent Positions

Beliau tidak memiliki rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik.

Does not hold any concurrent positions, including as a member of the Board of Directors, a member of the Board of Commissioners, and/or a member of a committee, or any other positions within or outside the Issuer or Public Company.

Kepemilikan Saham | Share Ownership

Tidak memiliki.

Does not hold any shares in the Company.

*Berhenti menjabat sejak 20 Februari 2026.
*Retired from office on 20 February 2026.

Boy Robyanto
Direktur Manajemen Risiko
Risk Management Director

Achmad Muchtasyar
Direktur Utama
President Director

Bachtiar Soeria Atmadja
Direktur Keuangan
Direktur Keuangan

Dwi Fatan Lilyana
Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum
Human Capital and General Affairs Director

Drajat Sulistyo
Wakil Direktur Utama
Vice President Director

Prasetyo
Direktur Pengembangan Usaha
Business Development Director

Prasetyadi
Direktur Operasi
Operations Director

M. Suriawan Wakan
Direktur Teknik
Technical Director

Hendri Ginting
Direktur Hubungan Kelembagaan
Business Development Director

Farid Padang
Direktur Komersial
Commercial Director

HUBUNGAN AFILIASI ANGGOTA DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS' AFFILIATED RELATIONSHIPS

Tabel Hubungan Afiliasi Direksi
Board of Director's Affiliated Relationships

Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Direksi
Board of Directors' Financial, Familial and Management Relationships

Nama Name	**Jabatan** Position	**Hubungan Keuangan Dengan** Financial Relationships with					
		Dewan Komisaris Board of Commissioners		**Direksi** Board of Directors		**Pemegang Saham Pengendali*** Controlling Shareholder	
		Ya	**Tidak**	**Ya**	**Tidak**	**Ya**	**Tidak**
Arif Suhartono	Direktur Utama President Director		√		√		√
Boy Robyanto	Direktur Manajemen Risiko Risk Management Director		√		√		√
Putut Sri Muljanto	Direktur Operasi merangkap Plt Direktur Pengembangan Usaha Operations Director and Acting Business Development Director		√		√		√
Dwi Fatan Lilyana	Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Human Resources and General Affairs Director		√		√		√
Drajat Sulistyo	Direktur Komersial Commercial Director		√		√		√
Bachtiar Soeria Atmadja	Direktur Keuangan Finance Director		√		√		√
M. Suriawan Wakan	Direktur Teknik Technical Director		√		√		√

*Langsung dan tidak langsung
*Direct and Indirect

	Hubungan Keluarga Dengan Familial Relationships with						Hubungan Kepengurusan Controlling Shareholder Relationship	
	Dewan Komisaris Board of Commissioners		**Direksi** Board of Directors		**Pemegang Saham Pengendali*** Controlling Shareholder			
	Ya	**Tidak**	**Ya**	**Tidak**	**Ya**	**Tidak**	**Ya**	**Tidak**
		√		√		√		√
		√		√		√		√
		√		√		√		√
		√		√		√		√
		√		√		√		√
		√		√		√		√
		√		√		√		√

PERUBAHAN KOMPOSISI ANGGOTA DIREKSI DAN ALASAN PERUBAHANNYA

Selama tahun 2025, terdapat perubahan komposisi Direksi. Perubahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan Pemegang Saham sebagaimana penjelasan berikut:

CHANGES IN THE BOARD OF DIRECTORS' MEMBERSHIP COMPOSITION

During 2025, there were changes to the Board of Directors composition he. These changes were made in accordance based on the Shareholders needs, as explained below:

KOMPOSISI DIREKSI PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) PERIODE 1 JANUARI 2025 – 7 MARET 2025

Komposisi Direksi periode 1 Januari 2025 sampai dengan 7 Maret 2025 berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Wakil Direktur Utama dan 5 (lima) orang Direktur. Komposisi dan dasar pengangkatan Direksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) BOARD OF DIRECTORS COMPOSITION FOR THE PERIOD OF JANUARY 1, 2025 – MARCH 7, 2025

The Board of Directors for the period from January 1, 2025, to March 7, 2025, consisted of seven members: one President Director, one Vice President Director, and five Directors. The composition and basis for appointment of the Board of Directors are shown in the table below.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi Periode 1 Januari 2025 – 7 Maret 2025
Composition and Basis for Appointment of the Board of Directors for the Period January 1, 2025 – March 7, 2025

Nama Name	**Jabatan** Position	**Pelaksana** Nominator	**Dasar Pengangkatan** Basis of Appointmen	**Tanggal Efektif** Effective Date
Arif Suhartono	Direktur Utama President Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	• Keputusan Menteri BUMN No. SK-69/MBU/03/2020 • Keputusan Menteri BUMN No. SK-39/MBU/02/2024 • Minister of SOEs Decree No. SK-69/MBU/03/2020 • Minister of SOEs Decree No. SK-39/MBU/02/2024	2 Maret 2020 March 2, 2020
Hambra	Wakil Direktur Utama Vice President Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	• Keputusan Menteri BUMN No. SK-272/MBU/11/2019 • Keputusan Menteri BUMN No. SK-309/MBU/12/2024 • Minister of SOEs No. SK-272/MBU/11/2019 • Minister of SOEs Decree No. SK-309/ MBU/12/2024	18 November 2019 November 18, 2019
Mega Satria*	Direktur Keuangan Finance Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-205/MBU/07/2023 Minister of SOEs No. SK-205/MBU/07/2023	24 Juli 2023 July 24, 2023
Ihsanuddin Usman	Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Human Resources and General Affairs Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-69/MBU/03/2020 Minister of SOEs No. SK-69/MBU/03/2020	2 Maret 2020 March 2, 2020
Prasetyo	Direktur Strategi Strategy Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-334/MBU/10/2021 Minister of SOEs No. SK-334/MBU/10/2021	1 Oktober 2021 October 1, 2021

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi Periode 1 Januari 2025 – 7 Maret 2025
Composition and Basis for Appointment of the Board of Directors for the Period January 1, 2025 – March 7, 2025

Nama Name	Jabatan Position	Pelaksana Nominator	Dasar Pengangkatan Basis of Appointmen	Tanggal Efektif Effective Date
Boy Robyanto	Direktur Investasi Investment Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-334/MBU/10/2021 Minister of SOEs No. SK-334/MBU/10/2021	1 Oktober 2021 October 1, 2021
Putut Sri Muljanto	Direktur Pengelola Managing Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-334/MBU/10/2021 Minister of SOEs No. SK-334/MBU/10/2021	1 Oktober 2021 October 1, 2021

KOMPOSISI DIREKSI PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) PERIODE 7 MARET 2025 – 25 JUNI 2025

Berdasarkan Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia Nomor: SK-51/MBU/03/2025 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia pada tanggal 7 Maret 2025, memutuskan:

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Ihsanuddin Usman sebagai Direktur SDM dan Umum.
2. Mengangkat Ihsanuddin Usman sebagai Direktur SDM dan Umum.

Dengan demikian, komposisi Direksi periode 7 Maret 2025 sampai dengan 25 Juni 2025 berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Wakil Direktur Utama dan 5 (lima) orang Direktur. Komposisi dan dasar pengangkatan Direksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) BOARD OF DIRECTORS COMPOSITION FOR THE PERIOD OF MARCH 1, 2025 –JUNE 25, 2025

Based on a copy of the Minister of SOEs Decree, as a General Meeting of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Shareholders No. SK-51/MBU/03/2025 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) on March 7, 2025, the following resolutions were made:

1. Confirming the honorable dismissal of Ihsanuddin Usman as Human Resources and General Affairs Director.
2. Appointing Ihsanuddin Usman as Human Resources and General Affairs Director.

Thus, the Board of Directors for the period from March 7, 2025, to June 25, 2025, consisted of 7 (seven) members: 1 (one) President Director, 1 (one) Vice President Director, and 5 (five) Directors. The composition and basis for appointment of the Board of Directors are shown in the table below.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi Periode 7 Maret 2025 – 25 Juni 2025
Composition and Basis for Appointment of the Board of Directors for the Period of March 7, 2025 – June 25, 2025

Nama Name	Jabatan Position	Pelaksana Nominator	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Tanggal Efektif Effective Date
Arif Suhartono	Direktur Utama President Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	• Keputusan Menteri BUMN No. SK-69/MBU/03/2020 • Keputusan Menteri BUMN No. SK-39/MBU/02/2024 • Minister of SOEs Decree No. SK-69/MBU/03/2020 • Minister of SOEs Decree No. SK-39/MBU/02/2024	2 Maret 2020 March 2, 2020
Hambra	Wakil Direktur Utama Vice President Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	• Keputusan Menteri BUMN No. SK-272/MBU/11/2019 • Keputusan Menteri BUMN No. SK-309/MBU/12/2024 • Minister of SOEs No. SK-272/MBU/11/2019 • Minister of SOEs Decree No. SK-309/ MBU/12/2024	18 November 2019 November 18, 2019

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi Periode 7 Maret 2025 – 25 Juni 2025
Composition and Basis for Appointment of the Board of Directors for the Period of March 7, 2025 – June 25, 2025

Nama Name	Jabatan Position	Pelaksana Nominator	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Tanggal Efektif Effective Date
Mega Satria	Direktur Keuangan Finance Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-205/MBU/07/2023 Minister of SOEs No. SK-205/MBU/07/2023	24 Juli 2023 July 24, 2023
Ihsanuddin Usman	Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Human Resources and General Affairs Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	• Keputusan Menteri BUMN No. SK-69/MBU/03/2020 • Keputusan Menteri BUMN No. SK-51/MBU/03/2025 • Minister of SOEs No. SK-69/MBU/03/2020 • Minister of SOEs No. SK-51/MBU/03/2025	2 Maret 2020 March 2, 2020
Prasetyo	Direktur Strategi Strategy Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-334/MBU/10/2021 Minister of SOEs No. SK-334/MBU/10/2021	1 Oktober 2021 October 1, 2021
Boy Robyanto	Direktur Investasi Investment Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-334/MBU/10/2021 Minister of SOEs No. SK-334/MBU/10/2021	1 Oktober 2021 October 1, 2021
Putut Sri Muljanto	Direktur Pengelola Managing Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-334/MBU/10/2021 Minister of SOEs No. SK-334/MBU/10/2021	1 Oktober 2021 October 1, 2021

KOMPOSISI DIREKSI PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) PERIODE 25 JUNI 2025 – 19 SEPTEMBER 2025

Berdasarkan Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danantara Asset Management Selaku Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia Nomor: SK-168/MBU/06/2025, Nomor: SK.024/DI-DAM/DO/2025 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia pada tanggal 25 Juni 2025, memutuskan:

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Ihsanuddin Usman sebagai Direktur SDM dan Umum.
2. Memberhentikan dengan hormat Prasetyo sebagai Direktur Strategi.
3. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi:

PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) BOARD OF DIRECTORS COMPOSITION FOR THE PERIOD OF JUNE 25, 2025 – SEPTEMBER 19, 2025

Based on a copy of the Decree of the Minister of SOEs and the President Director of PT Danantara Asset Management as Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia, No. SK-168/MBU/06/2025 and No. SK.024/DI-DAM/DO/2025 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia, dated June 25, 2025, the following resolutions were made:

1. Confirming the honorable dismissal of Ihsanuddin Usman as Human Resources and General Affairs Director.
2. Honorably dismissing Prasetyo as Strategy Director.
3. Appointing the following names as members of the Board of Directors:

No.	Nama Name	Jabatan Position
1	Dwi Fatan Lilyana	Direktur SDM dan Umum Human Resources and General Affairs Director
2	Drajat Sulistyo	Direktur Strategi Strategy Director

Dengan demikian, komposisi Direksi periode 25 Juni 2025 sampai dengan 19 September 2025 berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Wakil Direktur Utama dan 5 (lima) orang Direktur. Komposisi dan dasar pengangkatan Direksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Thus, the Board of Directors for the period from June 25, 2025, to September 19, 2025, consisted of 7 (seven) members: 1 (one) President Director, 1 (one) Vice President Director, and 5 (five) Directors. The composition and basis for appointment of the Board of Directors are shown in the table below.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi Periode 25 Juni 2025 – 19 September 2025
Composition and Basis for Appointment of the Board of Directors for the Period June 25, 2025 – September 19, 2025

Nama Name	**Jabatan** Position	**Pelaksana** Nominator	**Dasar Pengangkatan** Basis of Appointment	**Tanggal Efektif** Effective Date
Arif Suhartono	Direktur Utama President Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	• Keputusan Menteri BUMN No. SK-69/MBU/03/2020 • Keputusan Menteri BUMN No. SK-39/MBU/02/2024 • Minister of SOEs Decree No. SK-69/MBU/03/2020 • Minister of SOEs Decree No. SK-39/MBU/02/2024	2 Maret 2020 March 2, 2020
Hambra	Wakil Direktur Utama Vice President Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	• Keputusan Menteri BUMN No. SK-272/MBU/11/2019 • Keputusan Menteri BUMN No. SK-309/MBU/12/2024 • Minister of SOEs No. SK-272/MBU/11/2019 • Minister of SOEs Decree No. SK-309/ MBU/12/2024	18 November 2019 November 18, 2019
Mega Satria*	Direktur Keuangan Finance Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-205/MBU/07/2023 Minister of SOEs No. SK-205/MBU/07/2023	24 Juli 2023 July 24, 2023
Boy Robyanto	Direktur Investasi Investment Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-334/MBU/10/2021 Minister of SOEs No. SK-334/MBU/10/2021	1 Oktober 2021 October 1, 2021
Putut Sri Muljanto	Direktur Pengelola Managing Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-334/MBU/10/2021 Minister of SOEs No. SK-334/MBU/10/2021	1 Oktober 2021 October 1, 2021
Dwi Fatan Lilyana	Direktur SDM dan Umum HC and General Affairs Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama PT Danantara Asset Management No. SK-168/MBU/06/2025, No. SK.024/DI-DAM/DO/2025 Decrees of the Minister of SOEs and the President Director of PT Danantara Asset Management No. SK-168/MBU/06/2025, No. SK.024/DI-DAM/DO/2025	25 Juni 2025 June 25, 2025
Drajat Sulistyo	Direktur Strategi Strategy Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama PT Danantara Asset Management No. SK-168/MBU/06/2025, No. SK.024/DI-DAM/DO/2025 Decrees of the Minister of SOEs and the President Director of PT Danantara Asset Management No. SK-168/MBU/06/2025, No. SK.024/DI-DAM/DO/2025	25 Juni 2025 June 25, 2025

* Bahwa sehubungan telah diangkatnya Sdr. Mega Satria sebagai Direktur Keuangan PT Pertamina Patra Niaga pada tanggal 4 Juli 2025, maka perlu mengukuhkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Direktur Keuangan Pelindo.
*In connection with Mega Satria's appointment as PT Pertamina Patra Niaga Finance Director on July 4, 2025, it was necessary to confirm their dismissal as Finance Director at Pelindo.

KOMPOSISI DIREKSI PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) PERIODE 19 SEPTEMBER 2025 – 20 FEBRUARI 2026

Berdasarkan Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danantara Asset Management Selaku Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia Nomor: SK-264/MBU/09/2025, Nomor: SK.059/DI-DAM/DO/2025 Tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia pada tanggal 19 September 2025, memutuskan:

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Mega Satria sebagai Direktur Keuangan.
2. Memberhentikan dengan hormat Hambra sebagai Wakil Direktur Utama.
3. Mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi sebagai berikut:

PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) BOARD OF DIRECTORS COMPOSITION FOR THE PERIOD OF SEPTEMBER 19, 2025 – FEBRUARY 20, 2026

Based on a copy of the Decree of the Minister of SOEs and the President Director of PT Danantara Asset Management as Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia, No. 264/MBU/09/2025 and No. SK.059/DI-DAM/DO/2025 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia, dated September 19, 2025, the following resolutions were made:

1. Confirming the honorable dismissal of Mega Satria as Finance Director.
2. Honorably dismissing Hambra as Vice President Director.
3. Changing the nomenclature of positions for members of the Board of Directors as follows:

No.	Semula Previous	Menjadi Became
1	Wakil Direktur Utama Viice President Director	-
2	Direktur Strategi Strategy Director	Direktur Komersial Commercial Director
3	Direktur Pengelola Managing Director	Direktur Operasi Operations Director
4	Direktur Investasi Investment Director	Direktur Pengembangan Usaha Business Development Director
5	-	Direktur Manajemen Risiko Risk Management Director
6	-	Direktur Teknik Technical Director

4. Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi:

4. To assign the following as members of the Board of Directors:

No.	Nama Name	Semula Previous	Menjadi Became
1	Putut Sri Mulyanto	Direktur Pengelola Managing Director	Direktur Operasi Operations Director
2	Boy Robyanto	Direktur Investasi Investment Director	Direktur Manajemen Risiko Risk Management Director
3	Drajat Sulistyo	Direktur Strategi Strategy Director	Direktur Komersial Commercial Director

5. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi:

5. To appoint the following as members of the Board of Directors:

No.	Nama Name	Jabatan Position
1	Bachtiar Soeria Atmadja	Direktur Keuangan Finance Director
2	Hosadi Apriza Putra	Direktur Pengembangan Usaha Business Development Director
3	Muhammad Suriawan Wakan	Direktur Teknik Technical Director

Dengan demikian, komposisi Direksi periode 19 September 2025 sampai dengan saat ini berjumlah 8 (delapan) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, dan 7 (tujuh) orang Direktur. Komposisi dan dasar pengangkatan Direksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Thus, the composition of the Board of Directors for the period from September 19, 2025, to the present, consisted of 8 (eight) members, consisting of 1 (one) President Director and 7 (seven) Directors. The composition and basis for appointment of the Board of Directors can be seen in the table below.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi Periode 19 September 2025 – 20 Februari 2026
Composition and Basis for Appointment of the Board of Directors for the Period from September 19, 2025 to February 20, 2026

Nama Name	Jabatan Position	Pelaksana Nominator	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Tanggal Efektif Effective Date
Arif Suhartono	Direktur Utama President Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	• Keputusan Menteri BUMN No. SK-69/MBU/03/2020 • Keputusan Menteri BUMN No. SK-39/MBU/02/2024 • Minister of SOEs Decree No. SK-69/MBU/03/2020 • Minister of SOEs Decree No. SK-39/MBU/02/2024	2 Maret 2020 March 2, 2020
Boy Robyanto	Direktur Manajemen Risiko Risk Mangement Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-334/MBU/10/2021 Keputusan Menteri BUMN No. SK-334/MBU/10/2021	1 Oktober 2021 1 Oktober 2021
Putut Sri Muljanto	Direktur Operasi Operations Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-334/MBU/10/2021 Minister of SOEs No. SK-334/MBU/10/2021	1 Oktober 2021 October 1, 2021
Dwi Fatan Lilyana	Direktur SDM dan Umum Human Resources and General Affairs Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama PT Danantara Asset Management No. SK-168/MBU/06/2025, No. SK.024/DI-DAM/DO/2025 Ministry of SOEs Decree and President Director of PT Danantara Asset Decree No. SK-168/MBU/06/2025, No. SK.024/DI-DAM/DO/2025	25 Juni 2025 June 25, 2025
Drajat Sulistyo	Direktur Komersial Commercial Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama PT Danantara Asset Management No. SK-168/MBU/06/2025, No. SK.024/DI-DAM/DO/2025 Ministry of SOEs Decree and President Director of PT Danantara Asset Decree No. SK-168/MBU/06/2025, No. SK.024/DI-DAM/DO/2025	25 Juni 2025 June 25, 2025

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi Periode 19 September 2025 – 20 Februari 2026
Composition and Basis for Appointment of the Board of Directors for the Period from September 19, 2025 to February 20, 2026

Nama Name	**Jabatan** Position	**Pelaksana** Nominator	**Dasar Pengangkatan** **Basis of Appointment**	**Tanggal Efektif** **Effective Date**
Bachtiar Soeria Atmadja	Direktur Keuangan Finance Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama PT Danantara Asset Management No. SK-264/MBU/09/2025, Nomor: SK.059/DI-DAM/DO/2025 Ministry of SOEs Decree and President Director of PT Danantara Asset Decree No. SK-264/MBU/09/2025, No: SK.059/DI-DAM/DO/2025	19 September 2025 September 19, 2025
Hosadi Apriza Putra	Direktur Pengembangan Usaha Business Development Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama PT Danantara Asset Management No. SK-264/MBU/09/2025, Nomor: SK.059/DI-DAM/DO/2025 Ministry of SOEs Decree and President Director of PT Danantara Asset Decree No. SK-264/MBU/09/2025, Number: SK.059/DI-DAM/DO/2025	19 September 2025 September 19, 2025
Muhammad Suriawan Wakan	Direktur Teknik Technical Director	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama PT Danantara Asset Management No. SK-264/MBU/09/2025, Nomor: SK.059/DI-DAM/DO/2025 Ministry of SOEs Decree and President Director of PT Danantara Asset Decree No. SK-264/MBU/09/2025, No. SK.059/DI-DAM/DO/2025	19 September 2025 September 19, 2025

KOMPOSISI DIREKSI PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) PERIODE 20 FEBRUARI 2026 – SAAT INI

Berdasarkan Salinan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia Nomor: 131 Tahun 2026 Nomor: SK-058/DI-DAM/DO/2026 Tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia pada tanggal 20 Februari 2026, memutuskan:

1. Mengukuhkan pemberhentian Hosadi Apriza Putra sebagai Direktur Pengembangan Usaha.
2. Memberhentikan dengan hormat Arif Suhartono sebagai Direktur Utama dan Putut Sri Mulyanto sebagai Direktur Operasi.
3. Mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi yaitu Wakil Direktur Utama dan Direktur Hubungan Kelembagaan.
4. Mengalihkan penugasan Drajat Sulistyo yang semula sebagai Direktur Komersial menjadi Wakil Direktur Utama.
5. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi:

PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) BOARD OF DIRECTORS' COMPOSITION FOR THE PERIOD OF FEBRUARY 20, 2026 – PRESENT

Based on a copy of the PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Shareholders' Resolution Number 131 of 2026, Number: SK-058/DI-DAM/DO/2026 concerning the Dismissal, Change of Position Nomenclature, Transfer of Duties, and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dated February 20, 2026, it was decided:

1. Confirmed the dismissal of Hosadi Apriza Putra as Business Development Director.
2. Honorably dismissed Arif Suhartono as President Director and Putut Sri Mulyanto as Operations Director.
3. Changed the position nomenclature of members of the Board of Directors, to Vice President Director and Institutional Relations Director.
4. Transfered the assignment of Drajat Sulistyo from his previous position as Commercial Director to Vice President Director.
5. Appointed the following names as members of the Board of Directors:

No.	Nama Name	Jabatan Position
1	Achmad Muchtasyar	Direktur Utama Pesident Director
2	Farid Padang	Direktur Komersial Commercial Director
3	Prasetyo	Direktur Pengembangan Usaha Business Development Director
4	Hendri Ginting	Direktur Hubungan Kelembagaan Institutional Relations Director
5	Prasetyadi	Direktur Operasi Operations Director

Dengan demikian, komposisi Direksi periode 20 Februari 2026 sampai dengan saat ini berjumlah 8 (delapan) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, dan 7 (tujuh) orang Direktur. Komposisi dan dasar pengangkatan Direksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Thus, the Board of Directors composition for the period from February 20, 2026, to present, comprised 8 (eight) members, consisting of 1 (one) President Director and 7 (seven) Directors.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi Periode 19 September 2025 – Saat Ini
Board of Directors Composition and Basis for Appointment for the Period from September 19, 2025 to Present Table

Nama Name	Jabatan Position	Pelaksana Nominator	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Tanggal Efektif Effective Date
Achmad Muchtasyar	Direktur Utama President Director	Kementerian BUMN Ministry of BUMN	Keputusan Para Pemegang Saham No. 131 Tahun 2026 No. SK-058/DI-DAM/DO/2026 Shareholders' Resolution No. 131 of 2026, No. SK-058/DI-DAM/DO/2026	20 Februari 2026 February 20, 2026
Drajat Sulistyo	Wakil Direktur Utama Vice President Director	Kementerian BUMN Ministry of BUMN	Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama PT Danantara Asset Management No. SK-168/MBU/06/2025, No. SK.024/DI-DAM/DO/2025 Minister of BUMN and President Director of PT Danantara Asset Management Decrees No. SK-168/MBU/06/2025, No. SK.024/DI-DAM/DO/2025	25 Juni 2025 June 25, 2025
Boy Robyanto	Direktur Manajemen Risiko Risk Management Director	Kementerian BUMN Ministry of BUMN	Keputusan Menteri BUMN No. SK-334/MBU/10/2021 Minister of BUMN Decree No. SK-334/MBU/10/2021	1 Oktober 2021 October 1, 2021
Dwi Fatan Lilyana	Direktur SDM dan Umum HC and General Affairs Director	Kementerian BUMN Ministry of BUMN	Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama PT Danantara Asset Management No. SK-168/MBU/06/2025, No. SK.024/DI-DAM/DO/2025 Minister of BUMN and the President Director of PT Danantara Asset Management Decrees No. SK-168/MBU/06/2025, No. SK.024/DI-DAM/DO/2025	25 Juni 2025 June 25, 2025
Bachtiar Soeria Atmadja	Direktur Keuangan Finance Director	Kementerian BUMN Ministry of BUMN	Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama PT Danantara Asset Management No. SK-264/MBU/09/2025, Nomor: SK.059/DI-DAM/DO/2025 Minister of BUMN and the President Director of PT Danantara Asset Management Decrees No. SK-264/MBU/09/2025, No. SK.059/DI-DAM/DO/2025	19 September 2025 September 19, 2025

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi Periode 19 September 2025 – Saat Ini
Board of Directors Composition and Basis for Appointment for the Period from September 19, 2025 to Present Table

Nama Name	**Jabatan** Position	**Pelaksana** Nominator	**Dasar Pengangkatan** Basis of Appointment	**Tanggal Efektif** Effective Date
Muhammad Suriawan Wakan	Direktur Teknik Engineering Director	Kementerian BUMN Ministry of BUMN	Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama PT Danantara Asset Management No. SK-264/MBU/09/2025, Nomor: SK.059/DI-DAM/DO/2025 Minister of BUMN and the President Director of PT Danantara Asset Management Decrees No. SK-264/MBU/09/2025, No. SK.059/DI-DAM/DO/2025	19 September 2025 September 19, 2025
Farid Padang	Direktur Komersial Commercial Director	Kementerian BUMN Ministry of BUMN	Keputusan Para Pemegang Saham No. 131 Tahun 2026 No. SK-058/DI-DAM/DO/2026 Shareholders' Resolution No. 131 of 2026, No. SK-058/DI-DAM/DO/2026	20 Februari 2026 February 20, 2026
Prasetyo	Direktur Pengembangan Usaha Business Development Director	Kementerian BUMN Ministry of BUMN	Keputusan Para Pemegang Saham No. 131 Tahun 2026 No. SK-058/DI-DAM/DO/2026 Shareholders' Resolution No. 131 of 2026, No. SK-058/DI-DAM/DO/2026	20 Februari 2026 February 20, 2026
Hendri Ginting	Direktur Hubungan Kelembagaan Institutional Relations Director	Kementerian BUMN Ministry of BUMN	Keputusan Para Pemegang Saham No. 131 Tahun 2026 No. SK-058/DI-DAM/DO/2026 Shareholders' Resolution No. 131 of 2026, No. SK-058/DI-DAM/DO/2026	20 Februari 2026 February 20, 2026
Prasetyadi	Direktur Operasi Operations Director	Kementerian BUMN Ministry of BUMN	Keputusan Para Pemegang Saham No. 131 Tahun 2026 No. SK-058/DI-DAM/DO/2026 Shareholders' Resolution No. 131 of 2026, No. SK-058/DI-DAM/DO/2026	20 Februari 2026 February 20, 2026

K LINE
KMTC
CAPITAL
KMTC

Profil Dewan Komisaris
Board of Commissioners Profiles

19 Mei 2023 – 2028 (Periode Pertama)
May 19, 2023 – 2028 (First Term)

Warga Negara Indonesia
Indonesian

Jakarta, Indonesia
Jakarta, Indonesia

Lahir di Blitar, pada tahun 1955. Usia 70 tahun Per Desember 2025.
Born in Blitar in 1955. Age 70 as of December 2025.

Agus Suhartono

Komisaris Utama/Independen
President/Independent Commissioner

Riwayat Pendidikan | Educational History

- Akademi Angkatan Laut (1978).
- S1 bidang Ekonomi dari Naval Academy (1978).

- Naval Academy (1978).
- Bachelor's degree in Economics from the Naval Academy (1978).

Sertifikasi | Certification

-

Riwayat Jabatan | Positions Held

Pengalaman Kerja | Work Experience

- Patrol Ship, Corvet Ship, dan Destroyer Ship TNI Angkatan Laut (1978-2002).
- Gugus Tempur Laut Armada Timur (2003-2005).
- *Vice President to the Chief Planning and Budgeting* TNI Angkatan Laut (2005-2006).
- *Commander of the Naval Education and Training* (KODIKAL) (2006-2007).
- Komandan Panglima Angkatan Darat (2007-2008).

- *Assistant of the Chief Planning and Budgeting* TNI Angkatan Laut (2008-2009).
- *Inspector of the Defence Ministry* TNI Angkatan Laut (2009-2010).
- *Commander in Chief of the* Indonesian Armed Forces (2010-2013).
- Komisaris Utama PT Bukit Asam (Persero) Tbk (2013-2023).

- Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2023 – 2024).
- Komisaris Utama/Independen PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2024 – sekarang).

- Patrol Ship, Corvet Ship, and Destroyer Ship of the Indonesian Navy (1978-2002).
- Eastern Fleet Naval Combat Group (2003-2005).
- Vice President to the Chief Planning and Budgeting of the Indonesian Navy (2005-2006).
- Commander of Naval Education and Training (KODIKAL) (2006-2007).
- Commander of the Army (2007-2008).

- Assistant to the Chief Planning and Budgeting of the Indonesian Navy (2008-2009).
- Inspector of the Defense Ministry of the Indonesian Navy (2009-2010).
- Commander-in-Chief of the Indonesian Armed Forces (2010-2013).
- President Commissioner at PT Bukit Asam (Persero) Tbk (2013-2023).
- President Commissioner at PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2023–2024).
- President/Independent Commissioner at PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2024–present).

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis for Appointment

Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia Nomor: SK-101/MBU/05/2023 tanggal 19 Mei 2023 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia. Kemudian diangkat menjadi Komisaris Utama/Independen berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia Nomor: SK-2/MBU/01/2024 tanggal 3 Januari 2024.

Appointed for the first time as President Commissioner of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) based on the Minister of SOEs Decree as the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. SK-101/MBU/05/2023 dated May 19, 2023, concerning the Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Subsequently, was appointed as President/Independent Commissioner based on the Minister of SOEs Decree as the General Meeting of Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. SK-2/MBU/01/2024 dated January 3, 2024.

Jabatan Rangkap | Concurrent Positions

- Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi Pelindo (2023-sekarang).

Tidak memiliki rangkap pada Emiten atau Perusahaan Publik.

- Chair of the Pelindo Integrated Governance Committee (2023-present).

Does not hold concurrent positions in any Issuer or Public Company.

Kepemilikan Saham | Share Ownership

Tidak memiliki.

Does not hold any shares in the Company.

17 Desember 2024 – 2029 (Periode Pertama).
December 17, 2024 – 2029 (First Term).

Warga Negara Indonesia
Indonesian

Jakarta, Indonesia
Jakarta, Indonesia

Lahir di Jakarta, pada tahun 1966. Usia 59 tahun Per Desember 2025
Born in Jakarta in 1966. Age 59 as of December 2025.

Suntana

Wakil Komisaris Utama
Vice President Commissioner

Riwayat Pendidikan | Educational History

- Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) (1989).
- Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) (1997).
- Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (SESPIMMEN) (2004).
- Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (SESPIMTI) (2013).

- Indonesian Armed Forces Academy (AKABRI) (1989).
- Police Science College (PTIK) (1997).
- Middle Staff and Leadership College (SESPIMMEN) (2004).
- Senior Staff and Leadership College (SESPIMTI) (2013).

Sertifikasi | Certification

Sertifikasi CAFG (*Certified Anti Fraud Governance)* 2025.

Riwayat Jabatan | Positions Held

Pengalaman Kerja | Work Experience

- Kapolda Lampung (2018).
- Wakabaintelkam Polri (2018).
- Kapolda Jawa Barat (2021).
- Wakil Kepala BSSN (2023).
- Kabaintelkam Polri (2023-2024).
- Wakil Menteri Perhubungan (2024-Sekarang).
- Wakil Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2024 – sekarang).

- Lampung Police Chief (2018).
- Deputy Head of the National Police Intelligence Agency (2018).
- West Java Police Chief (2021).
- Deputy Head of BSSN (2023).
- Head of the National Police Intelligence Agency (2023-2024).
- Deputy Minister of Transportation (2024-Present).
- Vice President Commissioner of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2024 – present).

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis for Appointment

Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia Nomor: SK-308/MBU/12/2024 tanggal 17 Desember 2024 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia.

Appointed for the first time as Commissioner of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) based on the Minister of State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of the Limited Liability Company PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Decree Number: SK-308/ MBU/12/2024 dated December 17, 2024 concerning Dismissal, Changes in Position Nomenclature and Appointment of Members of the Board of Commissioners of the Limited Liability Company PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Jabatan Rangkap | Concurrent Positions

- Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Pelindo (2024-sekarang).

  Tidak memiliki rangkap pada Emiten atau Perusahaan Publik.

- Chair of the Pelindo Nomination and Remuneration Committee (2024-present).

  Tidak memiliki rangkap pada Emiten atau Perusahaan Publik.

Kepemilikan Saham | Share Ownership

Tidak memiliki.

Does not hold any shares in the Company.

22 Februari 2023 – 2028 (Periode Pertama)
February 22, 2023 – 2028 (First Term)

Warga Negara Indonesia
Indonesian

Jakarta, Indonesia
Jakarta, Indonesia

Lahir di Bandung, pada tahun 1977. Usia 48 tahun Per Desember 2025
Born in Bandung in 1977. Age 48 as of December 2025

Jodi Mahardi

Komisaris
Commissioner

Riwayat Pendidikan | Educational History

- S1 bidang Manajemen dari University of Massachusetts, Boston (2003).
- S2 bidang International Affairs dari University of St. Thomas, Houtson (2011).

- Bachelor's degree in Management from the University of Massachusetts, Boston (2003).
- Master's degree in International Affairs from the University of St. Thomas, Houston (2011).

Sertifikasi | Certification

- *Qualified Risk Governance Professional* (QRGP) (2023).
- *Certification in Audit Committee Practices* (CACP) (2024).
- Sertifikasi CAFG (*Certified Anti Fraud Governance*) 2025.

- Qualified Risk Governance Professional (QRGP) (2023).
- Certification in Audit Committee Practices (CACP) (2024).
- Sertifikasi CAFG (Certified Anti Fraud Governance) 2025.

Riwayat Jabatan | Positions Held

Pengalaman Kerja | Work Experience

- Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (2021 - 2022).
- Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (2022 - sekarang).
- Komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2023 - sekarang).

- Deputy for Maritime Resources Coordination at the Coordinating Ministry for Maritime Affairs and Investment (2021-2022).
- Deputy for Maritime Sovereignty and Energy Coordination at the Coordinating Ministry for Maritime Affairs and Investment (2022-present).
- Commissioner at PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2023-present).

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis for Appointment

Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia Nomor: SK-34/MBU/02/2023 tanggal 22 Februari 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia.

Appointed for the first time as Commissioner of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) based on the Minister of State-Owned Enterprises at the General Meeting of Shareholders of the Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia Decree Number: SK-34/MBU/02/2023 dated February 22, 2023 concerning Dismissal and Appointment of members of the Board of Commissioners of the Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia.

Jabatan Rangkap | Concurrent Positions

- Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Pelindo (2024-sekarang).

  Tidak memiliki rangkap pada Emiten atau Perusahaan Publik.

- Chair of the Pelindo Nomination and Remuneration Committee (2024-present).

  Tidak memiliki rangkap pada Emiten atau Perusahaan Publik.

Kepemilikan Saham | Share Ownership

Tidak memiliki.

Does not hold any shares in the Company.

17 Desember 2024 – 2029 (Periode Pertama)
December 17, 2024 – 2029 (First Term)

Padang, Indonesia
Padang, Indonesia

Jakarta, Indonesia
Jakarta, Indonesia

Lahir di Tanah Datar, pada tahun 1960.
Usia 65 tahun Per Desember 2025.
Born in Tanah Datar in 1960. Age 65 as of December 2025.

Elwi Danil

Komisaris
Commissioner

Riwayat Pendidikan | Educational History

- S1 bidang Hukum dari Universitas Andalas Padang (1985).
- S2 bidang Hukum dari Universitas Indonesia Jakarta (1991).
- S3 bidang Hukum dari Universitas Indonesia Jakarta (2001).

- Bachelor's degree in Law from Universitas Andalas Padang (1985).
- Master's degree in Law from Universitas Indonesia Jakarta (1991).
- PhD in Law from Universitas Indonesia Jakarta (2001).

Sertifikasi | Certification

Sertifikasi CAFG *(Certified Anti Fraud Governance)* 2025.

Riwayat Jabatan | Positions Held

Pengalaman Kerja | Work Experience

- Guru Besar Hukum Pidana, Universitas Andalas Padang (1987-sekarang).
- Komisaris PT Semen Padang (2003-2012).
- Pengajar dan Penguji pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan (2008 - sekarang).
- Tenaga Pengajar Badiklat Kejaksaan Agung RI (2023 - sekarang).
- Komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2024 - sekarang).

- Professor of Criminal Law, Universitas Andalas Padang, Padang (1987-present).
- Commissioner of PT Semen Padang (2003-2012).
- Lecturer and Examiner at the Doctoral Program in Law, Universitas Sumatera Utara, Medan (2008-present).
- Lecturer at the Republic of Indonesia Attorney General's Office of Education and Training Agency (2023-present).
- Commissioner at PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2024 - present).

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis for Appointment

Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia Nomor: SK-308/MBU/12/2024 tanggal 17 Desember 2024 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia.

Appointed for the first time as Commissioner of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) based on the Minister of State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of the Limited Liability Company PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Decree Number: SK-308/ MBU/12/2024 dated December 17, 2024 concerning Dismissal, Changes in Position Nomenclature and Appointment of Members of the Board of Commissioners of the Limited Liability Company PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Jabatan Rangkap | Concurrent Positions

- Guru Besar Hukum Pidana, Universitas Andalas Padang (1987 - sekarang).
- Pengajar dan Penguji pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan (2008 - sekarang).
- Tenaga Pengajar Badiklat Kejaksaan Agung RI (2023 - sekarang).
- Wakil Ketua Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko Pelindo (2024 - sekarang).
- Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi Pelindo (2024-sekarang).

Tidak memiliki rangkap pada Emiten atau Perusahaan Publik.

- Professor of Criminal Law, Universitas Andalas Padang, Padang (1987-present).
- Lecturer and Examiner at the Doctoral Program in Law, Universitas Sumatera Utara, Medan (2008-present).
- Lecturer at the Republic of Indonesia Attorney General's Office of Education and Training Agency (2023-present).
- Vice Chair of the GCG and Risk Management Monitoring Committee of Pelindo (2024 - present).
- Member of the Pelindo Integrated Governance Committee (2024 - present).

Has no concurrent positions in Issuers or Public Companies.

Kepemilikan Saham | Share Ownership

Tidak memiliki.

Does not hold any shares in the Company.

17 Desember 2024 – 2029 (Periode Pertama)
December 17, 2024 – 2029 (First Term)

Warga Negara Indonesia
Indonesian

Jakarta Timur, Indonesia
East Jakarta, Indonesia

Lahir di Magelang, pada tahun 1980. Usia 45 tahun Per Desember 2025.
Born in Magelang in 1980. Age 45 as of December 2025.

Rakhman Fuadhy

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Riwayat Pendidikan | Educational History

- S1 bidang Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung (1999).
- Sekolah Bahasa Jepang di Universitas Osaka (2000).
- S2 bidang Teknik Mesin dari Universitas Osaka (2004).
- S2 bidang Teknik Mesin dari Universitas Osaka (2006).

- Bachelor's degree in Electrical Engineering from Institut Teknologi Bandung (1999).
- Japanese Language School at Osaka University (2000).
- Master's degree in Mechanical Engineering from Osaka University (2004).
- Master's degree in Mechanical Engineering from Osaka University (2006).

Sertifikasi | Certification

Sertifikasi CAFG *(Certified Anti Fraud Governance)* 2025.

Riwayat Jabatan | Positions Held

Pengalaman Kerja | Work Experience

- Insinyur di Bosch Jepang, Pusat Penelitian dan Pengembangan Yokohama (2006-2011).
- Sekretaris Atase Pertahanan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo (2011-2014).
- Pendiri dan Pemilik Sesora Co, Ltd. Perusahaan Penyelenggara Acara Jepang di Tokyo (2014-sekarang).
- Komisaris Independen PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2024-sekarang).

- Engineer at Bosch Japan, Yokohama Research and Development Center (2006-2011).
- Secretary of Defense Attaché at the Embassy of the Republic of Indonesia in Tokyo (2011-2014).
- Founder and Owner of Sesora Co., Ltd. Japanese Event Organizer Company in Tokyo (2014-present).
- Independent Commissioner at PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2024-present).

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis for Appointment

Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia Nomor: SK-308/MBU/12/2024 tanggal 17 Desember 2024 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia.

Appointed for the first time as Commissioner of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) based on the Minister of State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of the Limited Liability Company PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Decree Number: SK-308/ MBU/12/2024 dated December 17, 2024 concerning Dismissal, Changes in Position Nomenclature and Appointment of Members of the Board of Commissioners of the Limited Liability Company PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Jabatan Rangkap | Concurrent Positions

- Pendiri dan Pemilik Sesora Co, Ltd. Perusahaan Penyelenggara Acara Jepang di Tokyo (2014-sekarang).
- Wakil Ketua Komite Audit Pelindo (2024 - sekarang).

Tidak memiliki rangkap pada Emiten atau Perusahaan Publik.

- Founder and Owner of Sesora Co., Ltd. Japanese Event Organizer Company in Tokyo (2014-present).
- Vice Chair of the Pelindo Audit Committee (2024 -present).

Has no concurrent positions in Issuers or Public Companies.

Kepemilikan Saham | Share Ownership

Tidak memiliki.

Does not hold any shares in the Company.

25 Juni 2025 – 2030 (Periode Pertama).
June 25, 2025 – 2030 (First Term).

Warga Negara Indonesia
Indonesian

Jakarta Selatan, Indonesia
South Jakarta, Indonesia

Lahir di Jakarta, pada tahun 1968. Usia 57 tahun Per Desember 2025.
Born in Jakarta in 1968. Age 57 as of December 2025.

Maximianus Puguh Djiwanto

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Riwayat Pendidikan | Educational History

- S1 bidang Akuntansi dari Universitas Trisakti, Jakarta (1995).

- Bachelor's degree in Accounting from Universitas Trisakti, Jakarta (1995).

Sertifikasi | Certification

Sertifikasi CAFG *(Certified Anti Fraud Governance)* 2025.

Riwayat Jabatan | Positions Held

Pengalaman Kerja | Work Experience

- *Deputy Senior Manager* Indonesian Bank Restructuring Agency (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) (1999-2004).
- *President Director* PT Capitalinc Investment Tbk (*Investment Holding Company*) (2004-2008).
- *President Director* PT Restyle Concept (*Operating Holding Company*) (2008).
- *President Director* PT Lupita Amanda (Mesa Stila Resort and Spa, Magelang) (2008-2009).
- *Director* PT Kemang Jaya Raya (Grand Kemang Hotel, Jakarta) (2008-2009).
- *Director* PT Retower Asia (Telco tower provider) (2007-2010).
- *Finance Director* PT Bank Pundi Indonesia, Tbk (2011-2014).
- *Operation Director* PT Bank Pundi Indonesia, Tbk (2014-2016).
- *Finance Director* PT Pam Lyonnaise Jaya (2017-Sekarang).
- Komisaris Independen PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2025-Sekarang).

- Deputy Senior Manager at the Indonesian Bank Restructuring Agency (Indonesian Bank Restructuring Agency) (1999-2004).
- President Director at PT Capitalinc Investment Tbk (Investment Holding Company) (2004-2008).
- President Director at PT Restyle Concept (Operating Holding Company) (2008).
- President Director at PT Lupita Amanda (Mesa Stila Resort and Spa, Magelang) (2008-2009).
- Director at PT Kemang Jaya Raya (Grand Kemang Hotel, Jakarta) (2008-2009).
- Director at PT Retower Asia (Telco tower provider) (2007-2010).
- Finance Director at PT Bank Pundi Indonesia Tbk (2011-2014).
- Operations Director at PT Bank Pundi Indonesia Tbk (2014-2016).
- Finance Director at PT Pam Lyonnaise Jaya (2017-Present).
- Independent Commissioner at PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2025-Present).

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis for Appointment

Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danantara Asset Management Selaku Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia Nomor SK-169/MBU/06/2025 dan Nomor SK.025/DI-DAM/DO/2025 tanggal 25 Juni 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia.

Appointed for the first time as Commissioner of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) based on the Minister of SOEs Decree and the President Director of PT Danantara Asset Management as Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. SK-169/MBU/06/2025 and No. SK.025/DI-DAM/DO/2025 dated June 25, 2025, concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Jabatan Rangkap | Concurrent Positions

- *Finance Director* PT Pam Lyonnaise Jaya (2017 – sekarang).
- Ketua Komite Audit Pelindo (2024 - sekarang).

Tidak memiliki rangkap pada Emiten atau Perusahaan Publik.

- Finance Director at PT Pam Lyonnaise Jaya (2017–present).
- Chair of the Pelindo Audit Committee (2024–present).

Has no concurrent positions in Issuers or Public Companies.

Kepemilikan Saham | Share Ownership

Tidak memiliki.

Does not hold any shares in the Company.

19 September 2025 – 2030 (Periode Pertama).
September 19, 2025 – 2030 (First Term).

Warga Negara Indonesia
Indonesian

Bekasi, Indonesia
Bekasi, Indonesia

Lahir di Jakarta, pada tahun 1971. Usia 54 tahun Per Desember 2025.
Born in Jakarta in 1971. Age 54 as of December 2025.

Arief Poyuono

Komisaris
Commissioner

Riwayat Pendidikan | Educational History

- S1 bidang Ekonomi dari Universitas Jayabaya, Jakarta (1996).
- S2 bidang Ilmu Komunikasi dari Universitas Jayabaya, Jakarta (2014).

- Bachelor's degree in Economics from Universitas Jayabaya, Jakarta (1996).
- Master's degree in Communication Studies from Universitas Jayabaya, Jakarta (2014).

Sertifikasi | Certification

Sertifikasi Nasional Sertified *Risk Governance Professional* ATKRT (Level IV) 2025.

Riwayat Jabatan | Positions Held

Pengalaman Kerja | Work Experience

- *Flight Steward* di PT Merpati Nusantara (1990 – 2014).
- *Adviser* di Metro Kajang Berhad – (2006-sekarang).
- *Adviser* di PT Agro Artha Surya (2024-sekarang).
- Komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2025-sekarang).

- Flight Steward at PT Merpati Nusantara (1990–2014).
- Advisor at Metro Kajang Berhad (2006–present).
- Advisor at PT Agro Artha Surya (2024–present).
- Commissioner at PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2025–present).

Pengalaman Organisasi | Organization Experience

- Anggota UNFRELL (1999).
- Ketua Departemen Keamanan Partai Demokrat (2004-2008).
- Ketua Umum Forum Pegawai Merpati Nusantara (2004-2014).
- Ketua LBH BUMN (2005-2010).
- Ketua Umum FSP BUMN Bersatu (2005-sekarang).
- Anggota Dewan Asosiasi Pengawas Ketenagakerjaan (2006-2010).
- Ketua Departemen Buruh Partai Gerindra (2010-2014).
- Wakil Ketua Umum Gerindra (2015-2020).
- Ketua Koordinator Asia Pasifik CNIE (2017-2018).
- Ketua Dewan Pembina Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia (2007- sekarang).

- Member of UNFRELL (1999).
- Head of the Democratic Party's Security Department (2004-2008).
- General Chair of the Merpati Nusantara Employee Forum (2004-2014).
- Chair of the State-Owned Enterprises Legal Aid Institute (2005-2010).
- General Chair of the United State-Owned Enterprises FSP (2005-present).
- Board Member of the Labor Supervisory Association (2006-2010).
- Head of the Gerindra Party's Labor Department (2010-2014).
- Deputy Chair of Gerindra (2015-2020).
- Asia Pacific Coordinator of CNIE (2017-2018).
- Chair of the Advisory Board of the Indonesian Palm Oil Plasma Farmers Association (2007-present).

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis for Appointment

- Anggota UNFRELL (1999).
- Ketua Departemen Keamanan Partai Demokrat (2004-2008).
- Ketua Umum Forum Pegawai Merpati Nusantara (2004-2014).
- Ketua LBH BUMN (2005-2010).
- Ketua Umum FSP BUMN Bersatu (2005-sekarang).
- Anggota Dewan Asosiasi Pengawas Ketenagakerjaan (2006-2010).
- Ketua Departemen Buruh Partai Gerindra (2010-2014).
- Wakil Ketua Umum Gerindra (2015-2020).
- Ketua Koordinator Asia Pasifik CNIE (2017-2018).
- Ketua Dewan Pembina Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia (2007- sekarang).

- Member of UNFRELL (1999).
- Head of the Democratic Party's Security Department (2004-2008).
- General Chair of the Merpati Nusantara Employee Forum (2004-2014).
- Chair of the State-Owned Enterprises Legal Aid Institute (2005-2010).
- General Chair of the United State-Owned Enterprises FSP (2005-present).
- Board Member of the Labor Supervisory Association (2006-2010).
- Head of the Gerindra Party's Labor Department (2010-2014).
- Deputy Chair of Gerindra (2015-2020).
- Asia Pacific Coordinator of CNIE (2017-2018).
- Chair of the Advisory Board of the Indonesian Palm Oil Plasma Farmers Association (2007-present).

Jabatan Rangkap | Concurrent Positions

- *Finance Director* PT Pam Lyonnaise Jaya (2017 – sekarang).
- Ketua Komite Audit Pelindo (2024 - sekarang).

Tidak memiliki rangkap pada Emiten atau Perusahaan Publik.

- Finance Director at PT Pam Lyonnaise Jaya (2017–present).
- Chair of the Pelindo Audit Committee (2024–present).

Has no concurrent positions in Issuers or Public Companies.

Kepemilikan Saham | Share Ownership

Tidak memiliki.

Does not hold any shares in the Company.

19 September 2025 – 2030 (Periode Pertama).
September 19, 2025 – 2030 (First Term).

Warga Negara Indonesia
Indonesian

Tangerang, Indonesia
Tangerang, Indonesia

Lahir di Payakumbuh, pada tahun 1972.
Usia 53 tahun Per Desember 2025.
Born in Payakumbuh in 1972. Age 53 as of December 2025.

Ilhamsyah

Komisaris
Commissioner

Riwayat Pendidikan | Educational History

D3 bidang Akuntansi dari STIE YAI, Jakarta (1997).

Diploma in Accounting from STIE YAI, Jakarta (1997).

Sertifikasi | Certification

Sertifikasi Nasional *Sertified Risk Governance Professional* ATKRT (Level IV) 2025.

- -

Riwayat Jabatan | Positions Held

Pengalaman Kerja | Work Experience

- Anggota Solidaritas Mahasiswa Indonesia Untuk Demokrasi (SMID) (1996-1998).
- Komite Buruh untuk Aksi Reformasi Koordinator (KOBAR) (1998-1999).
- Sekretaris Jenderal Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) (1999-2003).
- Aliansi Buruh Menggugat (ABM) Hubungan Antar Lembaga (2006-2009).
- Ketua Umum Serikat Buruh Transportasi Perjuangan Indonesia (SBTPI) (2005-2015).
- Ketua Umum Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (FBTPI) (2012-2015).
- Sekretaris Jendral Rumah Rakyat Indonesia (RRI) (2006-2008).
- Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) (2015-Sekarang).
- Komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2025-sekarang).

- Member of the Indonesian Student Solidarity for Democracy (SMID) (1996-1998).
- Coordinator of the Labor Committee for Reform Action (KOBAR) (1998-1999).
- Secretary General of the National Front of Indonesian Trade Union (FNPBI) (1999-2003).
- Alliance of Labor Lawyers (ABM) for Inter-Institutional Relations (2006-2009).
- General Chair of the Indonesian Transport Workers Union (SBTPI) (2005-2015).
- General Chair of the Indonesian Port Transport Workers Federation (FBTPI) (2012-2015).
- Secretary General of the Indonesian People's House (RRI) (2006-2008).
- General Chair of the Confederation of Indonesian Trade Union (KPBI) (2015-present).
- Commissioner at PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (2025-present).

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis for Appointment

Diangkat untuk pertama kalinya sebagai Komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danantara Asset Management Selaku Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia Nomor: SK-265/MBU/09/2025 dan SK.060/DI-DAM/DO/2025 Tanggal 19 September 2025 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia.

Appointed for the first time as Commissioner of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) based on the Minister of SOEs Decree and the President Director of PT Danantara Asset Management as Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia No. SK-265/MBU/09/2025 and SK.060/DI-DAM/DO/2025 dated September 19, 2025 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia.

Jabatan Rangkap | Concurrent Positions

- Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) (2015 - sekarang).
- Anggota Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko Pelindo (2025 - sekarang).

Tidak memiliki rangkap pada Emiten atau Perusahaan Publik.

- Chair of the Confederation of Indonesian Trade Unions (KPBI) (2015 - Present).
- Member of the GCG Committee and Risk Management Monitoring Committee of Pelindo (2025 - Present).

No concurrent positions in any Issuer or Public Company.

Kepemilikan Saham | Share Ownership

Tidak memiliki.

Does not hold any shares in the Company.

Jodi Mahardi
Komisaris
Commissioner

Agus Suhartono
Komisaris Utama/Independen
President/Independent
Commissioner

Suntana
Wakil Komisaris Utama
Vice President Commissioner

Elwi Danil
Komisaris
Commissioner

Maximianus Puguh Djiwanto
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Ilhamsyah
Komisaris
Commissioner

Arief Poyuono
Komisaris
Commissioner

Rakhman Fuadhy
Komisaris Independen
Independent Commissioner

HUBUNGAN AFILIASI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

AFFILIATE RELATIONSHIPS BETWEEN BOARD OF COMMISSIONERS MEMBERS

Tabel Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris
Board of Commissioners' Affiliated Relationships

Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Direksi
Board of Directors' Financial, Familial and Management Relationships

Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Keuangan Dengan Financial Relationships with					
		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali* Controlling Shareholder	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Agus Suhartono	Komisaris Utama/Independen President/Independent Commissioner		√		√		√
Suntana	Wakil Komisaris Utama Vice President Commissioner		√		√		√
Jodi Mahardi	Komisaris Commissioner		√		√		√
Elwi Danil	Komisaris Commissioner		√		√		√
Rakhman Fuadhy	Komisaris Independen Independent Commissioner		√		√		√
Maximianus Puguh Djiwanto	Komisaris Independen Independent Commissioner		√		√		√
Arief Poyuono	Komisaris Commissioner		√		√		√
Ilhamsyah	Komisaris Independen Independent Commissioner		√		√		√

*Langsung dan tidak langsung
*Direct and Indirect

PERUBAHAN KOMPOSISI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN ALASAN PERUBAHANNYA

Selama tahun 2025, terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris. Perubahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan Pemegang Saham sebagaimana penjelasan berikut:

CHANGES IN THE BOARD OF COMMISSIONERS COMPOSITION AND REASONS FOR THE CHANGES

During 2025, there were changes to the Board of Commissioners composition. These changes were made in accordance with the needs of Shareholders, as explained below:

KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) PERIODE 1 JANUARI 2025 – 25 JUNI 2025

Komposisi Dewan Komisaris periode 1 Januari 2025 sampai dengan 25 Juni 2025 sebanyak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama/Independen, 1 (satu) orang Wakil Komisaris Utama, 2 (dua) orang

PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) BOARD OF DIRECTORS COMPOSITION FOR THE PERIOD OF JANUARY 1, 2025 –JUNE 25, 2025

The Board of Commissioners for the period January 1, 2025, to June 25, 2025, consisted of seven members: one President/Independent Commissioner, one Vice President Commissioner, two Independent Commissioners, and three

	Hubungan Keluarga Dengan Familial Relationships with						Hubungan Kepengurusan Controlling Shareholder Relationship	
	Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali* Controlling Shareholder			
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
		√		√		√		√
		√		√		√		√
		√		√		√		√
		√		√		√		√
		√		√		√		√
		√		√		√		√
		√		√		√		√
		√		√		√		√

Komisaris Independen dan 3 (tiga) orang Komisaris. Komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Commissioners. The Board of Commissioners composition and basis for appointment are shown in the table below.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Komisaris Periode 1 Januari 2025 – 25 Juni 2025
Board of Commissioners Composition and Basis for Appointment for the Period January 1, 2025 – June 25, 2025

Nama Name	Jabatan Position	Pelaksana Nominator	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Tanggal Efektif Effective Date
Agus Suhartono	Komisaris Utama/Independen President/Independent Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-2/MBU/01/2024 Minister of SOEs Decree No. SK-2/MBU/01/2024	3 Januari 2024 January 3, 2024
Suntana	Wakil Komisaris Utama Vice President Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-308/MBU/12/2024 Minister of SOEs Decree No. SK-308/MBU/12/2024	17 Desember 2024 December 17, 2024
Jodi Mahardi	Komisaris Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-34/MBU/02/2023 Minister of SOEs Decree No. SK-34/MBU/02/2023	22 Februari 2023 February 22, 2023

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Komisaris Periode 1 Januari 2025 – 25 Juni 2025
Board of Commissioners Composition and Basis for Appointment for the Period January 1, 2025 – June 25, 2025

Nama Name	Jabatan Position	Pelaksana Nominator	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Tanggal Efektif Effective Date
Heru Sukanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-335/MBU/10/2021 Minister of SOEs Decree No. SK-335/MBU/10/2021	1 Oktober 2021 October 1, 2021
Andus Winarno	Komisaris Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-2/MBU/01/2024 Minister of SOEs Decree No. SK-2/MBU/01/2024	3 Januari 2024 January 3, 2024
Elwi Danil	Komisaris Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-308/MBU/12/2024 Minister of SOEs Decree No. SK-308/MBU/12/2024	17 Desember 2024 December 17, 2024
Rakhman Fuady Kurniawan	Komisaris Independen Independent Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-308/MBU/12/2024 Minister of SOEs Decree No. SK-308/MBU/12/2024	17 Desember 2024 December 17, 2024

KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) PERIODE 25 JUNI 2025 – 19 SEPTEMBER 2025

Berdasarkan Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danantara Asset Management Selaku Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia Nomor: SK-169/MBU/06/2025, Nomor: SK.025/DI-DAM/DO/2025 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia pada tanggal 25 Juni 2025, memutuskan:

1. Memberhentikan dengan hormat Heru Sukanto sebagai Komisaris Independen.
2. Mengangkat Maximianus Puguh Djiwanto sebagai Komisaris Independen.

Dengan demikian, komposisi Dewan Komisaris periode 25 Juni 2025 sampai dengan 19 September 2025 sebanyak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama/Independen, 1 (satu) orang Wakil Komisaris Utama, 2 (dua) orang Komisaris Independen dan 3 (tiga) orang Komisaris. Komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS OF PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) FOR THE PERIOD OF JUNE 25, 2025 – SEPTEMBER 19, 2025

Based on a copy of the Minister of SOEs Decree and the President Director of PT Danantara Asset Management as Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. SK-169/MBU/06/2025, No. SK.025/DI-DAM/DO/2025 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dated June 25, 2025, it was decided:

1. Honorably dismiss Heru Sukanto as Independent Commissioner.
2. Appoint Maximianus Puguh Djiwanto as Independent Commissioner.

Thus, the Board of Commissioners composition for the period from June 25, 2025, to September 19, 2025, consisted of 7 (seven) members: 1 (one) President/Independent Commissioner, 1 (one) Vice President Commissioner, 2 (two) Independent Commissioners, and 3 (three) Commissioners. The composition and basis for appointment of the Board of Commissioners can be seen in the table below.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Komisaris Periode 25 Juni 2025 – 19 September 2025
Composition and Basis for Appointment of the Board of Commissioners for the Period June 25, 2025 – September 19, 2025

Nama Name	Jabatan Position	Pelaksana Nominator	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Tanggal Efektif Effective Date
Agus Suhartono	Komisaris Utama/ Independen President/Independent Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-2/MBU/01/2024 - Minister of SOEs Decree No. SK-2/MBU/01/2024	3 Januari 2024 January 3, 2024
Suntana	Wakil Komisaris Utama Vice President Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-308/MBU/12/2024 - Minister of SOEs Decree No. SK-308/MBU/12/2024	17 Desember 2024 December 17, 2024
Jodi Mahardi	Komisaris Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-34/MBU/02/2023 - Minister of SOEs Decree No. SK-34/MBU/02/2023	22 Februari 2023 February 22, 2023
Andus Winarno	Komisaris Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-2/MBU/01/2024 - Minister of SOEs Decree No. SK-2/MBU/01/2024	3 Januari 2024 January 3, 2024
Elwi Danil	Komisaris Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-308/MBU/12/2024 - Minister of SOEs Decree No. SK-308/MBU/12/2024	17 Desember 2024 December 17, 2024
Rakhman Fuady Kurniawan	Komisaris Independen Independent Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-308/MBU/12/2024 - Minister of SOEs Decree No. SK-308/MBU/12/2024	17 Desember 2024 December 17, 2024
Maximianus Puguh Djiwanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama PT Danantara Asset Management No. SK-169/MBU/06/2025, No. SK.025/DI-DAM/DO/2025 Minister of SOEs and the President Director of PT Danantara Asset Management Decree No. SK-169/MBU/06/2025, No. SK.025/DI-DAM/DO/2025	25 Juni 2025 June 25, 2025

KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) PERIODE 19 SEPTEMBER 2025 – SAAT INI

Berdasarkan Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danantara Asset Management Selaku Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia Nomor: SK-265/MBU/09/2025, Nomor: SK.060/DI-DAM/DO/2025 Tentang Pemberhentian, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia pada tanggal 19 September 2025, memutuskan:

1. Memberhentikan dengan hormat Andus Winarno sebagai Komisaris.
2. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris:

COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS OF PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) FOR THE PERIOD OF SEPTEMBER 19, 2025 – PRESENT

Based on a copy of the Minister of SOEs Decree and the President Director of PT Danantara Asset Management as Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) SK-265/MBU/09/2025, No. SK.060/DI-DAM/DO/2025 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dated June 25, 2025, it was decided:

1. Honorably dismiss Andus Winarno as Commissioner.
2. Appoint the following as members of the Board of Commissioners:

No.	Nama Name	Jabatan Position
1	Arief Poyuono	Komisaris Independen Independent Commissioner
2	Ilhamsyah	Komisaris Commissioner

Dengan demikian, komposisi Dewan Komisaris periode 19 September 2025 sampai dengan saat ini sebanyak 8 (delapan) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama/Independen, 1 (satu) orang Wakil Komisaris Utama, 3 (tiga) orang Komisaris Independen dan 3 (tiga) orang Komisaris. Komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Thus, the Board of Commissioners for the period from September 19, 2025, to the present, consised of eight members: one President/Independent Commissioner, one Vice President Commissioner, three Independent Commissioners, and three Commissioners. The composition and basis for appointment of the Board of Commissioners are shown in the table below.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Komisaris Periode 19 September 2025 – Saat Ini
Composition and Basis for Appointment of the Board of Commissioners for the Period of September 19, 2025 – Present

Nama Name	Jabatan Position	Pelaksana Nominator	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Tanggal Efektif Effective Date
Agus Suhartono	Komisaris Utama/ Independen President/Independent Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-2/MBU/01/2024 Minister of SOEs Decree No. SK-2/MBU/01/2024	3 Januari 2024 January 3, 2024
Suntana	Wakil Komisaris Utama Vice President Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-308/MBU/12/2024 Minister of SOEs Decree No. SK-308/MBU/12/2024	17 Desember 2024 December 17, 2024
Jodi Mahardi	Komisaris Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-34/MBU/02/2023 Minister of SOEs Decree No. SK-34/MBU/02/2023	22 Februari 2023 February 22, 2023
Elwi Danil	Komisaris Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-308/MBU/12/2024 Minister of SOEs Decree No. SK-308/MBU/12/2024	17 Desember 2024 December 17, 2024
Rakhman Fuady Kurniawan	Komisaris Independen Independent Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN No. SK-308/MBU/12/2024 Minister of SOEs Decree No. SK-308/MBU/12/2024	17 Desember 2024 December 17, 2024

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Komisaris Periode 19 September 2025 – Saat Ini
Composition and Basis for Appointment of the Board of Commissioners for the Period of September 19, 2025 – Present

Nama Name	**Jabatan** Position	**Pelaksana** Nominator	**Dasar Pengangkatan** Basis of Appointment	**Tanggal Efektif** Effective Date
Maximianus Puguh Djiwanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama PT Danantara Asset Management No. SK-169/MBU/06/2025, No. SK.025/DI-DAM/DO/2025 Minister of SOEs and the President Director of PT Danantara Asset Management Decree No. SK-169/MBU/06/2025, No. SK.025/DI-DAM/DO/2025	25 Juni 2025 June 25, 2025
Arief Poyuono	Komisaris Independen Independent Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama PT Danantara Asset Management No. SK-265/MBU/09/2025, No. SK.060/DI-DAM/DO/2025 Minister of SOEs and the President Director of PT Danantara Asset Management Decree No. SK-265/MBU/09/2025, No. SK.060/DI-DAM/DO/2025	19 September 2025 September 19, 2025
Ilhamsyah	Komisaris Commissioner	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama PT Danantara Asset Management No. SK-265/MBU/09/2025, No. SK.060/DI-DAM/DO/2025 Minister of SOEs and the President Director of PT Danantara Asset Management Decree No. SK-265/MBU/09/2025, No. SK.060/DI-DAM/DO/2025	19 September 2025 September 19, 2025

Profil Pekerja
Employee Profiles

JUMLAH PEKERJA BERDASARKAN JENIS KELAMIN

NUMBER OF EMPLOYEES BASED ON GENDER

Tabel Jumlah Pekerja Berdasarkan Jenis Kelamin (dalam satuan)
Number of Employees Based on Gender (people)

Jenis Kelamin Gender	2025	2024
Pria Male	**5.270**	5.480
Wanita Female	**1.245**	1.274
Jumlah Total	**6.515**	**6.754**

JUMLAH PEKERJA BERDASARKAN LEVEL JABATAN

NUMBER OF EMPLOYEES BASED ON POSITION LEVEL

Tabel Jumlah Pekerja Berdasarkan Level Jabatan(dalam satuan orang)
Number of Employees Based on Position Level (people)

Level Jabatan Position Level	2025	2024
23	48	55
22	82	88
21	211	223
20	162	171
19	337	357
18	240	247
17	548	573
16	845	880
15	264	269
14	555	578
13	399	412
12	582	608
11	688	710
10	680	693
9	248	252
8	179	186
7	159	160
6	288	290
Non KJ (calpeg)	-	2
Jumlah Total	**6.515**	**6.754**

JUMLAH PEKERJA BERDASARKAN RENTANG USIA

NUMBER OF EMPLOYEES BASED ON AGE RANGE

Tabel Jumlah Pekerja Berdasarkan Rentang Usia (dalam satuan orang)
Number of Employees Based on Age Range (people)

Level Jabatan Age Range	2025	2024
Di bawah 26 tahun Below 26 Years	**7**	9
26 ≤ x < 36 tahun/years	**1.081**	1.444
36 ≤ x < 46 tahun/years	**2.882**	2.770
46 ≤ x < 51 tahun/years	**1.271**	1.336
51 ≤ x < 55 tahun/years	**1.055**	998
≥55 tahun/years	**219**	197
Jumlah Total	**6.515**	**6.754**

JUMLAH PEKERJA BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

NUMBER OF EMPLOYEES BASED ON EDUCATION LEVEL

Tabel Jumlah Pekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan (dalam satuan orang)
Number of Employees Based on Education Level (people)

Level Jabatan Education Level	2025	2024
Pascasarjana Postgraduate	**1.252**	1.256
Sarjana Bachelor's Degree	**3.172**	3.286
Sarjana Muda Bachelor of Arts	**807**	868
SLTA High School	**1.284**	1.344
SLTP Junior High School	**-**	-
Jumlah Total	**6.515**	**6.754**

JUMLAH PEKERJA BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN

NUMBER OF EMPLOYEES BASED ON EMPLOYMENT STATUS

Tabel Jumlah Pekerja Berdasarkan Status Kepegawaian (dalam satuan orang)
Number of Employees Based on Employment Status (people)

Status Kepegawaian Employment Status	2025	2024
Organik Organic	**6.515**	6.754
Non Organik* Non-Organic	**21.989****	15.316
Jumlah Total	**28.504**	**22.070**

*) Angka tersebut termasuk BOD Non Pelindo, PKWT, TAD dan Pemborongan.
**) Pada tahun sebelumnya jumlah Non Organik hanya BOD Non Pelindo, PKWT dan TAD belum termasuk dengan pemborongan, sedangkan pada tahun 2025 dilakukan penyesuaian pencatatan jumlah Non Organik dengan penambahan Pemborongan yang sebelumnya tidak masuk perhitungan.
*) This figure includes Non-Pelindo BOD, PKWT, TAD, and Contracting.
**) In previous years, the Non-Organic figure only included Non-Pelindo BOD, PKWT, and TAD, excluding contracting. In 2025, adjustments were made to the Non-Organic figure, adding Contracting, which was previously excluded.

Komposisi Pemegang Saham
Shareholders Composition

Komposisi Pemegang Saham disajikan sebagai berikut:

The shareholder composition is shown as follows:

Tabel Komposisi Pemegang Saham PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
Shareholder Composition of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)

Pemegang Saham Shareholders	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares	Nominal (Rp) Nominal Value (Rp)	Kepemilikan Ownership
Negara Republik Indonesia The Republic of Indonesia	8.475.067	8.475.067.000.000	100%

Per 1 Januari 2025 dan 31 Desember 2025, tidak terdapat perubahan komposisi pemegang saham.

Between January 1, 2025 and December 31, 2025, there were no changes in the composition of shareholders.

KLASIFIKASI PEMEGANG SAHAM

Per 31 Desember 2025, Pelindo merupakan Badan Usaha Milik Negara yang sahamnya 100% dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, tidak terdapat kepemilikan saham institusi lokal, kepemilikan institusi asing, kepemilikan individu lokal, dan kepemilikan individu asing.

SHAREHOLDER CLASSIFICATION

As of December 31, 2025, Pelindo is a State-Owned Enterprise, 100% owned by the Republic of Indonesia. Therefore, there is no local institutional shareholding, no foreign institutional shareholding, no local individual shareholding, and no foreign individual shareholding.

KOMPOSISI 20 PEMEGANG SAHAM TERBESAR

Sampai dengan 31 Desember 2025, Pelindo merupakan Badan Usaha Milik Negara yang sahamnya 100% dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, tidak terdapat informasi mengenai komposisi 20 (dua puluh) pemegang saham terbesar.

COMPOSITION OF THE 20 LARGEST SHAREHOLDERS

Up until December 31, 2025, Pelindo was a State-Owned Enterprise, 100% owned by the Republic of Indonesia. Therefore, there is no information available regarding the composition of the 20 (twenty) largest shareholders.

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM 5% ATAU LEBIH

Sampai dengan 31 Desember 2025, Pelindo merupakan Badan Usaha Milik Negara yang sahamnya 100% dimiliki oleh Negara Repulik Indonesia. Informasi mengenai komposisi pemegang saham 5% atau lebih Perseroan telah dijelaskan pada uraian komposisi pemegang saham.

SHAREHOLDERS COMPOSITION OF 5% OR MORE

Up until December 31, 2025, Pelindo was a State-Owned Enterprise, 100% owned by the Republic of Indonesia. Information regarding the composition of shareholders holding 5% or more of the Company is explained in the shareholder composition description.

KOMPOSISI KELOMPOK PEMEGANG SAHAM KURANG DARI 5%

Sampai dengan 31 Desember 2025, Pelindo merupakan Badan Usaha Milik Negara yang sahamnya 100% dimiliki oleh Negara Repulik Indonesia. Informasi mengenai komposisi pemegang saham 5% atau lebih Perseroan telah dijelaskan pada uraian komposisi pemegang saham.

COMPOSITION OF SHAREHOLDERS WITH LESS THAN 5% OWNERSHIP

Up until December 31, 2025, Pelindo was a State-Owned Enterprise, 100% owned by the Republic of Indonesia. Information regarding the composition of shareholders holding less than 5% or more of the Company is explained in the shareholder composition description.

KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN MANAJEMEN

Sampai dengan 31 Desember 2025, Dewan Komisaris, Direksi dan Manajemen Pelindo tidak mempunyai kepemilikan saham atas Pelindo. Kepemilikan saham seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia 100%. Dengan demikian, Pelindo tidak menyajikan menyajikan rincian anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang memiliki saham langsung maupun tidak langsung.

SHARE OWNERSHIP OF THE BOARD OF COMMISSIONERS, BOARD OF DIRECTORS, AND MANAGEMENT

As of December 31, 2025, the Board of Commissioners, Board of Directors, and Management of Pelindo did not own any share ownership in Pelindo. All shares are 100% owned by the Government of the Republic of Indonesia. Therefore, Pelindo does not provide details of the members of the Board of Directors or Board of Commissioners who own shares directly or indirectly.

Pemegang Saham Utama dan Pengendali
Majority and Controlling Shareholders

Kepemilikan saham mayoritas Pelindo dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dengan kepemilikan saham sebesar 100%. Dengan demikian, Pemegang Saham Utama dan Pengendali Pelindo adalah Negara Republik Indonesia sehingga tidak terdapat Pemegang Saham Utama dan Pengendali secara tidak langsung, sampai kepada pemiliki individu serta tidak terdapat Pemegang Saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain.

Pelindo's majority shareholding is the Republic of Indonesia, with 100% share ownership. Therefore, Pelindo's majority and controlling shareholder is the Republic of Indonesia. There are no indirect majority and controlling shareholders, down to individual owners, and no shareholders acting on behalf of other shareholders.

Daftar Entitas Anak, Perusahaan Asosiasi dan Perusahaan Ventura Bersama

List of Subsidiaries, Associated Companies and Joint Ventures

ENTITAS ANAK – *SUBHOLDING*

SUBSIDIARIES - SUBHOLDING

No.	Nama Name	Bidang Usaha Line of Business	Alamat Address
1.	PT Pelindo Terminal Petikemas	Bongkar Muat Petikemas Container Loading and Unloading	Jl. Perak Timur No. 478 Surabaya Jawa Timur 60165 Telp : (031) 99210456 Fax : - Email : info.tpk@pelindo.co.id Web : www.pelindotpk.co.id
2	PT Pelindo Multi Terminal	Operator Terminal Multipurpose Multipurpose Terminal Operator	Jl. Lingkar Pelabuhan No. 1, Belawan - Medan 20411 Telp : (061) 4100 0055 Fax : - Email : multi.terminal@pelindo.co.id Web : www.pelindomultiterminal.co.id
3	PT Pelindo Solusi Logistik	Logistik & *Hinterland Development* Logistics & Hinterland Development	Pelindo Tower, Lt 12-13, Jl. Yos Sudarso, 9, Rawa Badak Utara, Koja, Kota Adm. Jakarta Utara - DKI Jakarta, 14230 Telp : (021) 4301080 Fax : - Email : spsl@pelindo.co.id Web : www.pelindosolusilogistik.co.id
4	PT Pelindo Jasa Maritim	*Marine, equipment* dan *port services* (pengerukan, energi dan utilitas) Marine, equipment, and port services (dredging, energy, and utilities)	Jl. Soekarno No. 1, Makassar, Sulawesi Selatan, 90173 Telp : +62-811-1552-102 Fax : - Email : jasamaritim@pelindo.co.id Web : www.jasamaritim.co.id

ENTITAS ANAK - NON KLASTER

SUBSIDIARY ENTITIES - NON-CLUSTER

No.	Nama Name	Bidang Usaha Line of Business	Alamat Address
1	PT Prima Husada Cipta Medan	Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit, Klinik, dan Apotik Hospital, Clinic, and Pharmacy Healthcare Services	Jl. Stasiun No. 92 Kel. Belawan Bahagia Kec. Medan Belawan, 20411 Telp : (061) 6941927 Fax : - Email : ptphcm@gmail.com Web : www.phcm.co.id
2	PT Pelabuhan Indonesia Investama	Perusahaan Investasi Kepelabuhanan Port Investment Company	Pelindo Tower Lt. 11 Jl. Yos Sudarso No. 9, Rawabadak Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara, 14230 Telp : (021) 4301080 Fax : - Email : corsec@ipc-investco.com Web : www.ipc-investco.com
3	PT Integrasi Logistik Cipta Solusi	Teknologi Informasi Kepelabuhanan Port Information Technology	Pelindo Tower Lt. 10 Jl. Yos Sudarso No. 9, RW.13, Rawabadak Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara, 14230 Telp : 0811-8011-04 Fax : - Email : customercare@ilcs.co.id Web : www.ilcs.co.id

Kepemilikan Saham Share Ownership	Tahun Beroperasi Years of Operation	Status Status	Total Aset (Ribuan Rupiah) Total Assets (Thousands of Rupiah)
• PT Pelindo (Persero) 99,9978% • PT ILCS 0,0022%	2021	Beroperasi Operating	24.331.788.874 (konsolidasi) 13.448.343.943 (*stand alone*) 24,331,788,874 (consolidated) 13,448,343,943 (stand-alone)
• PT Pelindo (Persero) 99,988% • PT ILCS 0,012 %	2021	Beroperasi Operating	4.571.406.004 (konsolidasi) 2.815.694.410 (*stand alone*) 4,571,406,004 (consolidated) 2,815,694,410 (stand-alone)
• PT Pelindo (Persero) 99,9878% • PT ILCS 0,0122%	2021	Beroperasi Operating	19.325.931.158 (konsolidasi) 8.895.826.700 (*stand alone*) 19,325,931,158 (consolidated) 8,895,826,700 (stand-alone)
• PT Pelindo (Persero) 99,995% • PT ILCS 0,005%	2021	Beroperasi Operating	7.857.564.560 (konsolidasi) 8.895.826.700 (*stand alone*) 7,857,564,560 (consolidated) 8,895,826,700 (stand-alone)

Kepemilikan Saham Share Ownership	Tahun Beroperasi Years of Operation	Status Status	Total Aset (Ribuan Rupiah) Total Assets (Thousands of Rupiah)
• PT Pelindo (Persero): 99,69% • Koperasi Karyawan Kantor Pusat Pelindo I: 0,31%	2016	Beroperasi Operating	66.568.900
• PT Pelindo (Persero): 100%	2017	Beroperasi Operating	1.189.467.973
• PT Pelindo (Persero): 99,00% • Koperasi Pegawai Maritim Tanjung Priok: 1,00%	2012	Beroperasi Operating	815.863.518

No.	Nama Name	Bidang Usaha Line of Business	Alamat Address
4	PT Electronic Data Interchange Indonesia	• Jasa Konsultasi & Pengembangan Teknologi Informasi • *Product & Project* IT sektor Government • *Product & Project* IT sektor *Private* • *Product & Project* IT sektor BUMN • *Mass* IT *Product* • Jasa Infrastruktur IT • Information Technology Consulting & Development Services • Government IT Products & Projects • Private IT Products & Projects • State-Owned Enterprise IT Products & Projects • Mass IT Products • IT Infrastructure Services	Wisma SMR Lantai 3 Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Sunter, Jakarta Utara, 14350 Telp : (021) 650 5829 Fax : (021) 650 5987 Email : corporate@edi-indonesia.co.id Web : www.edi-indonesia.co.id
5	PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia	• Jasa Pendidikan dan Pelatihan • *Residence & Convention* • MICE • *Assessment & Consulting* • Education and Training Services • Residence & Convention Center • MICE (Micro, Small, and Medium Enterprises) • Assessment & Consulting	Jl. Beringin I No. 1 Pandansari Gadog Kec. Ciawi, Kab. Bogor, Jawa Barat, 16720 Telp : (0251) 7555622/7555614 Corp. Communication: +62 811-8099-789 Fax : - Email : marketing@pmli.co.id (*Marketing*), corpsec@pmli.co.id (*Corporate Secretary*) Web : www.pmli.co.id
6	PT Jakarta International Container Terminal	Pelayanan jasa terminal bongkar muat barang dan petikemas serta kegiatan yang berhubungan dengan konsolidasi dan distribusi barang Terminal services for loading and unloading goods and containers, as well as activities related to the consolidation and distribution of goods	Jl. Sulawesi Ujung No. 1 Tanjung-Priok, Jakarta, 14310 Telp : (021) 80678100 Faks : (021) 80678111 Email : customer.care@jict.co.id Web : www.jict.co.id

ENTITAS CUCU / ENTITIES OF SUBSIDIARIES

No.	Nama Name	Bidang Usaha Line of Business	Alamat Address
1	PT IPC Terminal Petikemas	Terminal Peti Kemas dan Konvensional Container and Conventional Terminals	Jl. Raya Pelabuhan, Tanjung Priok, Jakarta Utara, 14310 Telp: (021) 4301080, 4003899/77 Fax: - Email: - Website: www.iptpk.co.id
2	PT Prima Terminal Petikemas	Terminal Petikemas (Jasa Kepelabuhanan/BUP) Container Terminal (Port Services/ BUP)	Graha Pelindo Satu Gedung B Lt. 2 Jl. Lingkar Pelabuhan No. 1, Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan, Kota M209edan Telp: (061) 41000055 ext. 2216 Fax: - Email: prima@primatpk.com Web: www.primatpk.com
3	PT Berlian Jasa Terminal Indonesia	Terminal Petikemas (Jasa Kepelabuhanan/BUP) Container Terminal (Port Services/ BUP)	Jl. Perak Barat 379, Surabaya Telp: (031) 3291596 – 97 Fax: - Email: info@bjtiport.co.id Web: www.bjtiport.co.id
4	PT Terminal Petikemas Surabaya	Terminal Petikemas Container Terminal	Jl. Tanjung Mutiara No. 1 Surabaya, 60177 *Customer Service*: (031) 3202020 Humas : 031-3283269 Email : cs@tps.co.id, humas@tps.co.id Web : www.tps.co.id

Kepemilikan Saham Share Ownership	Tahun Beroperasi Years of Operation	Status Status	Total Aset (Ribuan Rupiah) Total Assets (Thousands of Rupiah)
• PT Pelindo (Persero): 51,00% • PT Sisindokom Teknologi: 49,00%	1995	Beroperasi Operating	35.635.847
• PT Pelindo (Persero): 99,74% • PT Integrasi Logistik Cipta Solusi: 0,26%	2013	Beroperasi Operating	635.864.32
• PT Pelindo (Persero): 51,00% • Hutchison Port Jakarta Pte. Ltd.: 48,90% • Koperasi Pegawai Maritim Tj. Priok: 0,10%	1999	Beroperasi Operating	1.285.234.785.750 USD76.584.125

Kepemilikan Saham Share Ownership	Tahun Pendirian Years of Operation	Status Operasi Status	Total Aset (Ribuan Rupiah) Total Assets (Thousands of Rupiah)
• PT Pelindo Terminal Petikemas: 99,00% • PT Integrast Logistik Cipta Solusi:1,00%	2013	Beroperasi Operating	2.009.861.476
• PT Pelindo Terminal Petikemas: 99,70% • PT Integrasi Logistik Cipta Solusi: 0,30%	2021	Beroperasi Operating	3.725.687.431
• PT Pelindo Terminal Petikemas: 96,84% • Koperasi Pegawai Pelabuhan Indonesia: 3,16%	2002	Beroperasi Operating	5.186.210.209
• PT Pelindo Terminal Petikemas: 99,50% • Koperasi Pegawai Pelabuhan Indonesia: 0,50%	1999	Beroperasi Operating	2.371.178.368

No.	Nama Name	Bidang Usaha Line of Business	Alamat Address
5	PT Terminal Teluk Lamong	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut Sea Port Service Activities	Jl. Raya Tambak Osowilangun KM. 12, Surabaya, 60191 Telp : (031) 99001500 Fax : (031) 99001490 Email : terminal@teluklamong.co.id Web : www.teluklamong.co.id
6	PT Kaltim Kariangau Terminal	Pelayanan jasa terminal bongkar muat barang dan petikemas serta kegiatan yang berhubungan dengan konsolidasi dan distribusi barang Terminal services for loading and unloading goods and containers, as well as activities related to the consolidation and distribution of goods	Jl. Pulau Balang No. 1 KM. 13 Kel. Kariangau Kec. Balikapapan Barat, Balikpapan Telp : 08115377044 Fax : - Email : callcenter@kariangauterminal.co.id Web : www.kariangauterminal.co.id
7	PT Prima Multi Terminal	Bongkar muat petikemas dan nonpetikemas (curah cair, curah kering, *general cargo*) Container and non-container loading and unloading (liquid bulk, dry bulk, general cargo)	Jl. Pelabuhan No. 1 Kuala Tanjung Kec. Sei Suka Kab. Batubara Sumatera Utara, 21657 Telp : (0622)-5341871 Fax : - Email : corp@ktmt.co.id Web : www.primamultiterminal.co.id
8	PT Pelabuhan Tanjung Priok	Bongkar muat non petikemas (curah cair, curah kering, *general cargo*) Non-container loading and unloading (liquid bulk, dry bulk, general cargo)	Jl. Raya Pelabuhan No. 9 Tanjung Priok, Jakarta Utara Telp : (021) 4301080 Fax : - Email : ptpmultipurpose@ptp.co.id Web : www.ptp.co.id
9	PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk	Bongkar muat khusus kendaraan, alat berat, *sparepart* Special loading and unloading of vehicles, heavy equipment, and spare parts	Jl. Sindang Laut No. 100 Cilincing, Jakarta Utara Telp : (021) 43932251 Fax : (021) 43932250 Email : indo@indonesiacarterminal.co.id Web : www.indonesiacarterminal.co.id
10	PT Terminal Curah Utama	Terminal dan Persewaan Tangki Curah Cair Liquid Bulk Tank Terminals and Rentals	Jl. Deli No. 8 Pelabuhan, Tj. Mas, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, 50249 Telp : (024) 86578169 Fax : - Email : pttcu@pelindo.co.id Web : www.terminalcurahutama.co.id

	Kepemilikan Saham Share Ownership	Tahun Pendirian Years of Operation	Status Operasi Status	Total Aset (Ribuan Rupiah) Total Assets (Thousands of Rupiah)
	• PT Pelindo Terminal Petikemas: 99,50% • Koperasi Pegawai Pelabuhan Indonesia : 0,50%	2014	Beroperasi Operating	1.423.989.301
	• PT Pelindo Terminal Petikemas: 50,00% • Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya: 50,00%	2012	Beroperasi Operating	143.341.509
	• PT Pelindo Terminal Petikemas: 50,00% • Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya : 50,00%	2019	Beroperasi Operating	4.075.408.195
	• PT Pelindo Multi Terminal: 99,00% • PT Integrasi Logistik Cipta Solusi: 1,00%	2013	Beroperasi Operating	1.026.956.750
	• PT Pelindo Multi Terminal: 71,28% • PT Pelabuhan Indonesia Investama: 5,54% • Publik: 23,18%	2012	Beroperasi Operating	2.042.005.709
	• PT Pelindo Multi Terminal: 51,00% • PT Indonesia Bulk Terminal: 49,00%	2016	Beroperasi Operating	20.786.842

No.	Nama Name	Bidang Usaha Line of Business	Alamat Address
11	PT Prima Pengembang Kawasan	• *Real Estate* • Aktivitas Profesional Ilmiah dan Teknis • Pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan daur ulang sampah dan aktivitas remediasi • Konstruksi • Informasi dan komunikasi • Pengangkutan dan pergudangan • Pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin • Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor • Real Estate • Scientific and Technical Professional Activities • Water management, wastewater management, waste recycling management, and remediation activities • Construction • Information and Communication • Transportation and Warehousing • Provision of electricity, gas, and electricity Steam/hot water and cold air • Wholesale and retail trade, car and motorcycle repair and maintenance	Graha Pelindo Satu Jl. Lingkar Pelabuhan No. 1 Belawan, Medan, 20411 Telp : (061) 6628088 Fax : Email : primakawasan@ptppk.co.id Web : -
12	PT Prima Indonesia Logistik	Pengusahaan kegiatan bisnis logistik Logistics business activities	Jl. Raya Pelabuhan, Pos II Road VI, Ujung Baru Belawan Telp : 081397512125 Fax : (061) 6940113 Email : bisnislogistik@primaindonesialogistik.com Web : www.primaindonesialogistik.com
13	PT Multi Terminal Indonesia	Jasa Logistik Logistics Services	Jl. Pulau Payung No. 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara Telp : (021) 29104000 Fax : - Email : customercare.ipclogistic.co.id Web : mtimultiscm.co.id
14	PT Akses Pelabuhan Indonesia	Pengembangan Jalan Tol Toll Road Development	Maritime Tower Lantai 12 Jl. Yos Sudarso No. 9 Kec. Koja, Jakarta Utara, 14230 Telp : (021) 6456310 Fax : - Email : adm.api@portaccess.co.id Web : aksespelabuhan.co.id
15	PT Menara Maritim Indonesia	Properti, *Real Estate* Property, Real Estate	Maritime Tower Lt 8, Jalan Yos Sudarso No. 9, Rawa Badak Utara, Koja, Jakarta Utara Telp : (021) 22444557 Fax : - Email : corporate@menara-maritim.co.id Web : PT Menara Maritim Indonesia
16	PT Pelindo Solusi Maritim	• *Equipment Maintenance* • *Engineering Project & Consultancy* • *Equipment Provider* • *Port Equipment Manufacture* • *Marine Equipment Maintenance* • *Spareparts & Fuel Supplies* • Equipment Maintenance • Engineering Project & Consultancy • Equipment Provider • Port Equipment Manufacture • Marine Equipment Maintenance • Spareparts & Fuel Supplies	Gedung Rukindo Lt. 4 Jl. Raya Ancol Baru, Ancol Timur, Jakarta, 14430 Telp : (021) 2243 4285 Fax : - Email : corpsec@jppi.co.id Web : www.pelindosolusimaritim.co.id

	Kepemilikan Saham Share Ownership	Tahun Pendirian Years of Operation	Status Operasi Status	Total Aset (Ribuan Rupiah) Total Assets (Thousands of Rupiah)
	• PT Pelindo Solusi Logistik: 90,00% • PT Prima Multi Terminal: 10,00%	2015	Beroperasi Operating	923.314.719
	• PT Pelindo Solusi Logistik: 99,73% • Koperasi Karyawan Pelabuhan Unit Usaha TPK Kotamadya Medan: 0,27%	2015	Beroperasi Operating	362.523.821
	• PT Pelindo Solusi Logistik: 99,78% • Koperasi Pegawai Maritim Tj.Priok: 0,22%	2002	Beroperasi Operating	1.116.358.925
	• PT Pelindo Solusi Logistik: 99,79% • PT Pelabuhan Tanjung Priok: 0,21%	2014	Beroperasi Operating	13.039.799.424
	• PT Pelindo Solusi Logistik: 99,99% • PT Akses Pelabuhan Indonesia: 0,1%	2018	Beroperasi Operating	1.018.963.789
	• PT Pelindo Jasa Maritim: 99,71% • PT Intehrasi Logistik Cipta Solusi: 0,29%	2012	Beroperasi Operating	342.510.038

No.	Nama Name	Bidang Usaha Line of Business	Alamat Address
17	PT Jasa Armada Indonesia Tbk	• Pelayanan Jasa Pandu • Pelayanan Jasa Tunda • Pelayanan Jasa • Pengangkutan Kapal • Pelayanan Jasa Pengelolaan Kapal • Pilotage Services • Tug Services • Services • Ship Transportation • Ship Management Services	Gedung Rukindo Jl. Raya Ancol Baru, Ancol Timur, Jakarta, 14430 Gedung Citra Towers North Tower Lantai 21 Jl. Benyamin Suaeb Kav. A6, Kemayoran, Jakarta 10630 Telp : (021) 4306789 Email : corsec@ipcmarine.co.id Web : www.ipcmarine.co.id
18	PT Energi Pelabuhan Indonesia	Pengelolaan Utilitas yang meliputi Ketenagalistrikan, kontraktor ketenagalistrikan, pelayanan air bersih dan pengelolaan limbah Utility Management including Electricity, electricity contractors, clean water services, and waste management	Gedung PLN UP3 Tanjung Priok Jl. Yos Sudarso No. 30, Tanjung Priok, Jakarta Utara, 14320 Telp : (021) 4305047 Fax : (021) 4305052 Email : corsec@ecopowerport.co.id Web : www.ecopowerport.co.id
19	PT Pengerukan Indonesia	Pengerukan, reklamasi, Galangan dan perbengkelan kapal Dredging, reclamation, shipyards and workshops	Gedung PT Rukindo Jl. Raya Ancol Baru, Ancol Timur, Jakarta, 14430 Telp : (021) 4301380 Fax : - Email : corsec@rukindo.co.id, admin@rukindo.co.id Web : www.rukindo.co.id
20	PT Pelindo Marine Service	*Integrated Marine Services* dengan Menyediakan ragam layanan maritim terintegrasi mulai dari jasa penundaan dan pemanduan kapal, pengerukan dan penyiapan lahan, manajemen alur pelayaran, logistik dan distribusi energi, hingga jaringan transportasi multimoda dan penanganan project cargo Integrated Marine Services, providing a range of integrated maritime services ranging from tug and pilotage services, dredging and land preparation, shipping lane management, logistics, and distribution Energy, multimodal transportation networks, and project cargo handling	Jl. Prapat Kurung Utara No. 58 Kel. Perak Utara, Kec. Pabean Cantikan, Surabaya, 60165 Telp : (031) 3282321, 3282278 Fax : - Email : info@pelindomarines.com Web : www.pelindomarine.com
21	PT Berkah Industri Mesin Angkat	*Port Equipment Services, Heavy Equipment Services, General Engineering,* dan *General Supplier* Port Equipment Services, Heavy Equipment Services, General Engineering, and General Supplier	Jl. Perak Timur No. 428, Perak Utara, Kec. Pabean Cantian, Kota Surabaya, 60165 Telp : (031) 9909-3444 Fax : - Email : info@ptbima.id Web : www.ptbima.id
22	PT Lamong Energi Indonesia	Kelistrikan dan jasa penunjang lainnya (pengelola pembangkit listrik, penyedia tenaga listrik dan fasilitas yang berhubungan dengan kelistrikan serta utilitas di lingkungan pelabuhan dan kawasan industri) Electricity and other supporting services (power plant management, electricity supply, and electricity-related facilities and utilities in port and industrial areas)	Jl. Perak Timur No.478, Perak Utara, kec. Pabean Cantian, Surabaya, Jawa Timur 60165 Telp : (031) 9921 0477 Fax : (031) 9900 1490 Email : info@lamongenergi.co.id Web : www.lamongenergi.co.id
23	PT Intan Sejahtera Utama	Jasa Penyedia Tenaga Kerja (TKAD) Manpower Provision Services (TKAD)	Jl. H. I. A. Saleh Dg. Tompo No. 11, Makassar, 90113 Telp : (0411) 8944074 Fax : - Email : intansejahterautam@gmail.com Web : https://intansejahterautama.co.id/

Kepemilikan Saham Share Ownership	Tahun Pendirian Years of Operation	Status Operasi Status	Total Aset (Ribuan Rupiah) Total Assets (Thousands of Rupiah)
• PT Pelindo Jasa Maritim: 76,89% • PT Multi Terminal Indonesia: 0,11% • Publik: PT Pelabuhan Indonesia Investama: 11,05% • Publik Lain-lain: 11,80% • Treasury Stock: 0,15%	2013	Beroperasi Operating	1.814.879.258
• PT Pelindo Jasa Maritim: 55,00% • PT Haleyora Power: 45,00%	2012	Beroperasi Operating	263.158.256
• PT Pelindo Jasa Maritim: 99,98% • PT Pelindo Solusi Logistik: 0,02%	1991	Beroperasi Operating	201.935.906
• PT Pelindo Jasa Maritim: 98,23% • Koperasi Pegawai Pelabuhan Indonesia: 1,77%	2011	Beroperasi Operating	2.716.589.772
• PT Pelindo Jasa Maritim: 92,14% • Koperasi Pegawai Pelabuhan Indonesia 7,69% Koperasi Karyawan PT Pelabuhan Indonesia IV: 0,17%	2015	Beroperasi Operating	997.497.247
• PT Pelindo Jasa Maritim: 99,00% • Koperasi Pegawai Pelabuhan Indonesia: 1,00%	2014	Beroperasi Operating	569.607.167
• PT Pelindo Jasa Maritim : 99,60% • PT Berkah Industri Mesin Angkat: 0,40%	2018	Beroperasi Operating	35.389.049

No.	Nama Name	Bidang Usaha Line of Business	Alamat Address
24	PT Pelindo Daya Sejahtera	• Layanan Jasa Tenaga Kerja (alih daya, pemborongan, harian lepas) • Layanan Asesmen, Pelatihan dan Konsultasi (asesmen, psikotes, rekrutmen, sertifikasi, pelatihan, *e-learning*) • Layanan Pendukung Bisnis (sistem perparkiran, jasa kebersihan, jasa pertamanan) • Manpower Services (outsourcing, contracting, casual labor) • Assessment, Training, and Consulting Services (assessment, psychological testing, recruitment, certification, training, e-learning) • Business Support Services (parking systems, cleaning services, landscaping services)	Jl. Perak Timur 620, Surabaya Telp : 08113311711 Fax : - Email : tata.usaha@ptpds.co.id, marketing@ptpds.co.id Web : www.ptpds.co.id

ENTITAS CICIT

SUBSIDIARIES OF SUBSIDIARIES

No	Nama Name	Bidang Usaha Line of Business	Alamat Address
1	PT New Priok Container Terminal 1	Pelayanan jasa terminal bongkar muat barang dan petikemas serta kegiatan yang berhubungan dengan konsolidasi dan distribusi barang Terminal services for loading and unloading goods and containers, as well as activities related to the consolidation and distribution of goods.	Jl. Terminal Kalibaru Raya Kav. B No. 1 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara Telp : (021) 29144888 Fax : (021) 29144888 Email : ccommercial@npct1.co.id Web : www.NPCT1.co.id
2	PT Berlian Manyar Sejahtera	Terminal Nonpetikemas (Jasa Kepelabuhanan/BUP) Non-Container Terminal (Port Services/BUP)	***Office*** Gapura Surya Nusantara (GSN) Lt. 2 Jl. Perak Timur 620, Surabaya Telp : (031)-99097788 Fax : - Email : office@bms.jiipe.co.id Web : www.jiipe.com ***Port*** Pelabuhan JIIPE Jl. Raya Manyar KM 11 Manyar, Gresik, Jawa Timur
3	PT Pelindo Properti Indonesia	Pelaksana konstruksi, Konstruksi Bangunan Komersial, Konstruksi Hotel, Restoran dan Bangunan Serupa, Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, DAM dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya, Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan aying), Jalan, Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara Construction Contractors: Commercial Building Construction, Hotel, Restaurant, and Similar Building Construction, Water Channel Construction, Ports, Dams, and Other Water Resources Infrastructure, Highway Construction (except for underpasses), Roads, Railways, and Airport Runways.	Jl. Perak Barat No. 379 RT. 02 RW. 03 Kel. Perak utara Kec. Pabean Cantian, Surabaya Telp : (031) 3568050 Fax : - Email : sekper@pelindoproperti.co.id Web : www.pelindoplace.com

	Kepemilikan Saham Share Ownership	Tahun Pendirian Years of Operation	Status Operasi Status	Total Aset (Ribuan Rupiah) Total Assets (Thousands of Rupiah)
	• PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia: 90,00% • Koperasi Pegawai Pelabuhan Indonesia: 10,00%	2014	Beroperasi Operating	502.998.902

	Kepemilikan Saham Share Ownership	Tahun Pendirian Years of Operation	Status Operasi Status	Total Aset 2025 (Ribuan Rupiah) Total Assets (Thousands of Rupiah)
	• IPC TPK: 51% • Sea Terminal Management Service PTE.LTD: 49%	2014	Beroperasi Operating	4.385.668.018.812 USD 261.331.666
	• PT Berlian Jasa Terminal Indonesia: 60,00% • PT Usaha Era Pratama Nusantara: 40,00%	2012	Beroperasi Operating	2.248.703.860.474
	• PT Berlian Jasa Terminal Indonesia: 99,93% • Koperasi Pegawai Pelabuhan Indonesia: 0,07%	2014	Beroperasi Operating	258.675.595.150

No	Nama Name	Bidang Usaha Line of Business	Alamat Address
4	PT Belawan New Container Terminal	Terminal Peti Kemas (Jasa Kepelabuhanan/BUP) Container Terminal (Port Services/BUP)	Grha Pelindo Satu, Gedung B Lt. 5, Jl. Lingkar Pelabuhan No. 1, Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Telp: +62 61 6940032 Email: bnct-id.care@bnct.id.com Web: https://portal.bnct-id.com/sso/
5.	PT Pelindo Dredging Solution	Layanan bongkar muat pelabuhan Port loading and unloading services	Jl. Perak Timur No.610, Surabaya Telp: - Fax: - Email: - Web: -
6.	PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways	Badan Usaha Jalan Tol Toll Road Business Entities	Kantor Pusat : Jalan Sriamur, Desa Srijaya, Kecamatan Tambun Utara, Bekasi, Jawa Barat, Indonesia Bekasi, Jawa Barat, Indonesia Legalitas Domisili: Waskita Rajawali Tower Lt.7 Jl. Mayor Jendral M.T. Haryono Kav. 12-13, Kel. Bidaracina, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur, 13330 Alamat Korespondensi: Tamansari Hive Office Building Lt.6 Unit B Jl. Mayor Jenderal D. I. Panjaitan Kav. 2A, Kel. Cipinang Cempedak, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur, 13310 Telp : (+62)21 89229717 / (+62)21 89229718 Fax : (021) 2286 4761 Email : ctp-tollways@ctptollways.co.id Web : www.ctptollways.co.id
7.	PT Pelindo Energi Logistik	Jasa logistik baik bidang gas, Liquid/cair BBM dan Non-BBM, serta pengelolaan limbah Logistics services in the fields of gas, liquid fuel, and non-fuel, as well as waste management.	Gedung B Pelindo Regional III Lt2 & Lt3 Jl Perak Timur No 610, Surabaya, Indonesia Telp : (031) 328 4275 Fax : (031) 328 4456 Email : info@pel.co.id Web :www.pel.co.id
8.	PT Alur Pelayaran Barat Surabaya	Jasa konstruksi bangunan pelabuhan dan dermaga, pengerukan dan penyiapan lahan Port and dock building construction services, dredging, and land preparation.	Jl. Perak Timur No. 478 Surabaya 60165 Indonesia Telp : (031) 3283971 Fax : (031) 3283972 Email : info@ptapbs.com Web : www.ptapbs.com
9	PT Tanjung Emas Daya Sejahtera	Pengelolaan Jasa Tally Tally Service Management	Jl. Perak Timur No.620, Perak Utara, Kec. Pabean Cantian, Surabaya, Jawa Timur 60165 Telp : +62-853-3123-7838 Fax : - Email : tu@teds.co.id Web : www.teds.co.id

	Kepemilikan Saham Share Ownership	Tahun Pendirian Years of Operation	Status Operasi Status	Total Aset 2025 (Ribuan Rupiah) Total Assets (Thousands of Rupiah)
	• PT Prima Terminal Petikemas: 51% • PT INA DPWorld Investment: 49%	2023	Beroperasi Operating	9.672.742.000.000 $576.376.000
	PT Pengerukan Indonesia : 100%	2016	Beroperasi Operating	8.159.688.006
	• PT Akses Pelabuhan Indonesia: 99,9977% • PT Menara Maritim Indonesia: 0,0023%	2006	Beroperasi Operating	13.009.091.663
	• PT Pelindo Marine Service: 98,90% • PT Berlian Jasa Terminal Indonesia: 1,10%	2014	Beroperasi Operating	513.400.367.601
	• PT Pelindo Marine Service: 93,00% • PT Gerbang Sarana Utama: 7,00%	2014	Beroperasi Operating	571.836.938.023
	• PT Pelindo Daya Sejahtera: 99,00 • Koperasi Pegawai Pelabuhan Indonesia: 1,00%	2014	Beroperasi Operating	41.508.418.167

PERUSAHAAN ASOSIASI ASSOCIATED COMPANIES

No.	Nama Name	Bidang Usaha Line of Business	Alamat Address
1	PT Pelabuhan Patimban Internasional	Badan Usaha Pelabuhan, Pengelola Pelabuhan Patimban ref Terminal Kendaraan dan Terminal Petikemas Port Business Entity, Patimban Port Management, Vehicle Terminal and Container Terminal	Menara Bank Mega, Lantai 24 Jl. Kapten P. Tendean Kav. 12-14A, Jakarta, 12790 Telp: (021) 79175533 Fax: (021) 79173300 Email: - Web: -
2	PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera	Kawasan Industri, Pengadaan Listrik, Pengelolaan Air dan Limbah, Informasi dan Komunikasi Kawasan Industrial Area, Electricity Supply, Water and Waste Management, Regional Information and Communication	Jl. Raya Manyar KM. 11, Manyar, Gresik Telp: (031) 98540999 Fax: (031) 98540998 Email: - Web: www.jiipe.com
3	PT Terminal Nilam Utara	Terminal dan Persewaan Tangki Curah Cair Liquid Bulk Tank Terminal and Rental	Jl. Nilam Utara No. 1, Pabean Cantian, Surabaya Telp: (031) 9909 4737 Fax: - Email: - Web: www.tnu.co.id
4	PT Prima Tangki Indonesia	Jasa Sewa Tangki Timbun Storage Tank Rental Services	Jl. Rencong No. 1B, Pahlawan Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan, 20233 Jl. Pelabuhan No. 3 Kuala Tanjung, Kec. Sei Suka, Kab. Batu bara, 21257 Telp: (061) 4201 1470 Fax: - Email: Commercial@Primatangki.co.id Web: www.Primatangki.co.id
5	PT Jasamarga Bali Tol	Pengoperasian dan Pelayanan Jalan Tol Toll Road Operation and Service	Grha Bali Tol, Jalan Raya Pelabuhan Benoa No.88 Kota Denpasar, Bali 80222 Telp : (0361) 725326 Email : corporate@jasamargabalitol.co.id Web : www.jasamargabalitol.co.id
6	PT Ambang Barito Nusapersada	Pengelolaan Alur Ambang Sungai Barito Barito River Barrage Management	Jl. Yos Sudarso No. 6 RT. 034/RW. 002 Telaga Biru, Banjarmasin Barat, Banjarmasin Telp: (0511) 4423345 Fax: (0511) 4423346 Email: - Web: www.ambapers.com
7	PT Lamong Nusantara Gas	Bisnis Bidang Logistik Baik Bidang Gas Logistics Business, Including Gas	Kantor PGN Area Surabaya Lt. 4B Jl. Pemuda No. 56-58, Surabaya, 60271 Telp: (031) 5490555 Fax: - Email: info@ptlng.co.id Web: www.ptlng.co.id
8	PT Rumah Sakit Pelabuhan	Pelayanan Kesehatan Health Services	Jl. Kramat Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, 14260 Telp: (021) 4403026 Fax : - Email : - Web : www.rspelabuhan.com
9	PT Pelindo Husada Citra	Pelayanan Kesehatan Health Services	Jl. Prapat Kurung Selatan No. 1 Tanjung Perak, Surabaya Telp : (031) 329 4801-3 Fax : (031) 329 4808 Email : - Web : www.phc.co.id

Kepemilikan Saham Share Ownership	Tahun Pendirian Years of Operation	Status Operasi Status	Total Aset 2025 (Ribuan Rupiah) Total Assets (Thousands of Rupiah)
• PT Terminal Petikemas Surabaya: 10,00% • PT CT Corp Infrastruktur Indonesia: 32,00% • PT Interport Patimban Agung: 29,00% • PT Patimban Maju Bersama: 29,00%	2021	Belum Beroperasi Not Yet Operating	1.908.296.000.000
• PT Berlian Jasa Terminal Indonesia: 40,00% • PT Usaha Era Pratama Nusantara: 60,00%	2012	Beroperasi Operating	12.629.122.872.108
• PT Berlian Jasa Terminal Indonesia: 40,00% • PT Andahanesa Abadi: 60,00%	2013	Beroperasi Operating	337.939.985.264
• PT Prima Indonesia Logistik: 20% • Charleston Logistic Pte Ltd: 49% • PT Tason Putra Mandiri: 22,80% • Tuan Gaotama Setiawan: 8,20%	2019	Beroperasi Operating	255.178.113.356
• PT Pelindo (Persero): 13,86% • PT Jasa Marga (Persero) Tbk: 64,44% • Pemerintah Provinsi Bali: 6,32% • Pemerintah Kabupaten Badung: 6,32% • PT Angkasa Pura I (Persero): 6,31% • PT Adhi Karya (Persero) Tbk: 0,79% • PT Hutama Karya (Persero): 0,79% • PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero): 0,79% • PT Wijaya Karya (Persero): 0,40%	2011	Beroperasi Operating	1.889.340.835
PT Pelindo (Persero): 40,00% PD Bangun Banua Kalimantan Selatan: 60,00%	2004	Beroperasi Operating	220.943.853.172
PT Pelindo Energi Logistik: 49,00% PT PGN LNG Indonesia: 51,00%	2019	Beroperasi Operating	42.406.995.040
• PT Pelindo (Persero): 32,88% • Koperasi Pegawai Maritim Tj. Priok: 0,12% • PT Pertamina Bina Medika – IHC: 67,00%	1999	Beroperasi Operating	445.520.024.027
• PT Pelindo (Persero): 31,73% • PT Pertamina Bina Medika: 67,00% • Koperasi Pegawai Pelindo III: 1,27%	1999	Beroperasi Operating	467.721.434.082

No.	Nama Name	Bidang Usaha Line of Business	Alamat Address
10	PT Pertamina Bina Medika	Pelayanan Kesehatan Health Services	Jl. Kyaimaja No.43, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12120 Telp : (021) 7219001 / (021) 7219299 Fax : - Email : info.pbmihc@pertamedika.co.id Web : www.pertamedika.co.id

KERJASAMA OPERASI

JOINT OPERATION

No.	Nama Name	Bidang Usaha Line of Business	Alamat Address
1	Kerjasama Operasi (KSO) Terminal Petikemas KOJA	Jasa Bongkar Muat dan Penumpukan Peti Kemas Container Loading, Unloading and Stacking Services	Jl. Digul No.1, Koja, Tanjung Priok, Jakarta Utara, 14210, Indonesia Telp : +62 81234178626 Fax : - Email : corsec@tpkkoja.co.id ;customer.service@tpkkoja.co.id Website : https://www.tpkkoja.co.id
2	Manajemen Kerjasama Operasi (MKO) Maspion Kendaraan Terminal Indonesia	Pelayanan Jasa Terminal Kendaraan Terminal Services Vehicles	Jl. Beta Kawasan Industri Maspion V, Manyarsidomukti, Manyar Sido Mukti, Kec. Manyar, Kabupaten Gresik, 61151 Telp : (031) 99006314, 39921490 Fax : - Email : info@maspioncarterminal.co.id, mko.mtki@ gmail.com Facebook : Maspion Car Terminal Website : www.maspioncarterminal.co.id

Kepemilikan Saham Share Ownership	Tahun Pendirian Years of Operation	Status Operasi Status	Total Aset 2025 (Ribuan Rupiah Total Assets (Thousands of Rupiah)
• PT Pertamina (Persero): 81,11% • PT Pelindo (Persero): 6,00% • PT Perkebunan Nusantara X: 5,62% • PT Perkebunan Nusantara XI: 1,94% • PT Perkebunan Nusantara XII: 1,74% • PT Timah Tbk: 1,78% • PT Krakatau Steel (Persero), Tbk: 0,75% • PT Krakatau Industrial Estate Cilegon: 0,61% • PT Krakatau Bandar Samudera: 0,44% • PT Pertamina Pedeve Indonesia: 0,01%	2008	Beroperasi Operating	9.106.817.901.131

Kepemilikan Saham Share Ownership	Tahun Pendirian Years of Operation	Status Operasi Status	Total Aset 2025 (Ribuan Rupiah Total Assets (Thousands of Rupiah)
PT Pelindo (Persero) 54,91% PT Hutchison Port Indonesia 45,09%	1996	Beroperasi Operating	3.869.273.541.939
PT Indonesia Kendaraan Terminal: 45,00% PT Maspion: 55,00%	2015	Beroperasi Operating	3.264.171.347

Struktur Grup Perusahaan
Company Group Structure

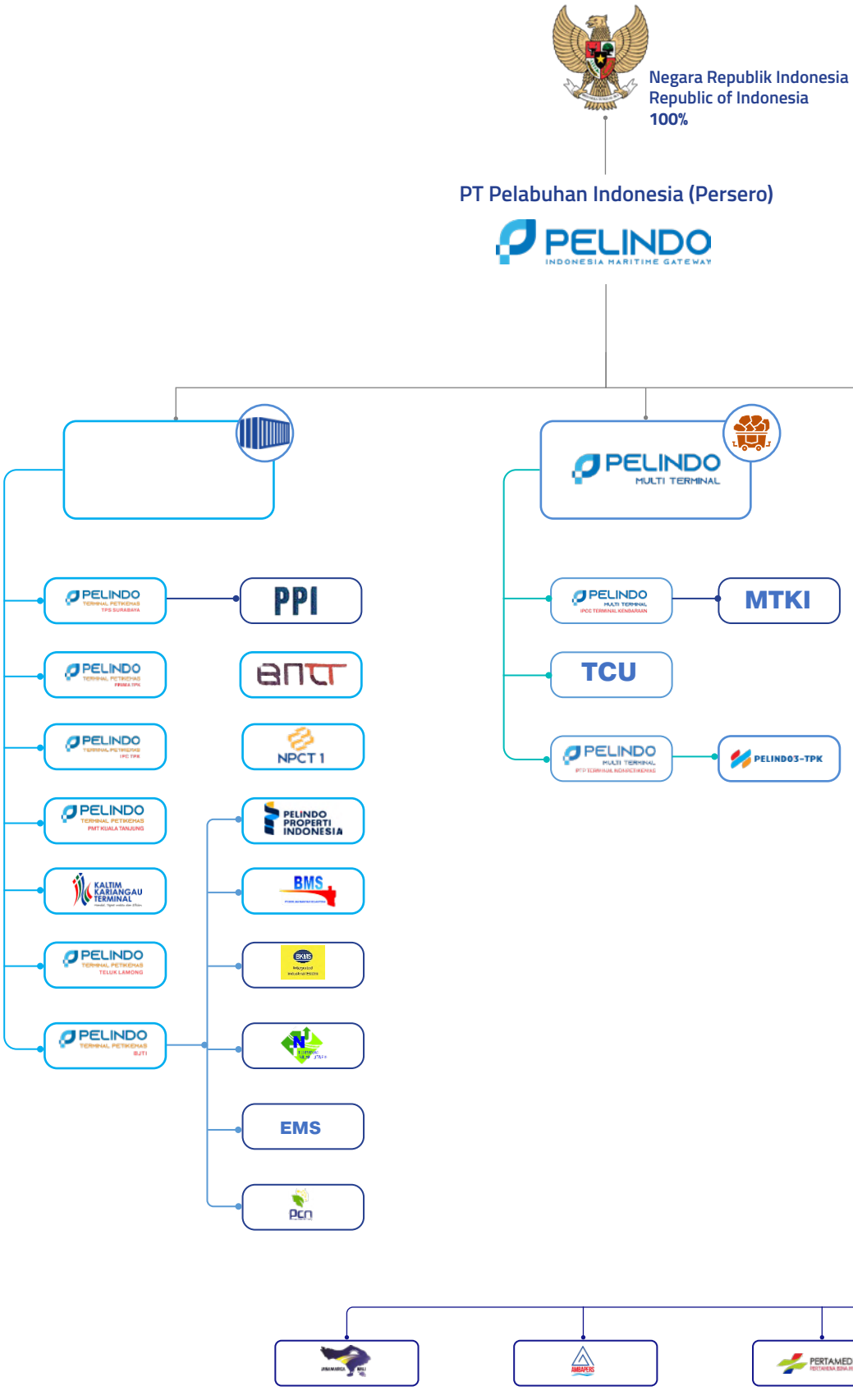

Per 31 Desember 2024, Pelindo tidak memiliki *Special Purpose Vehicle* (SPV).
As of December 31, 2024, Pelindo does not have a Special Purpose Vehicle (SPV).

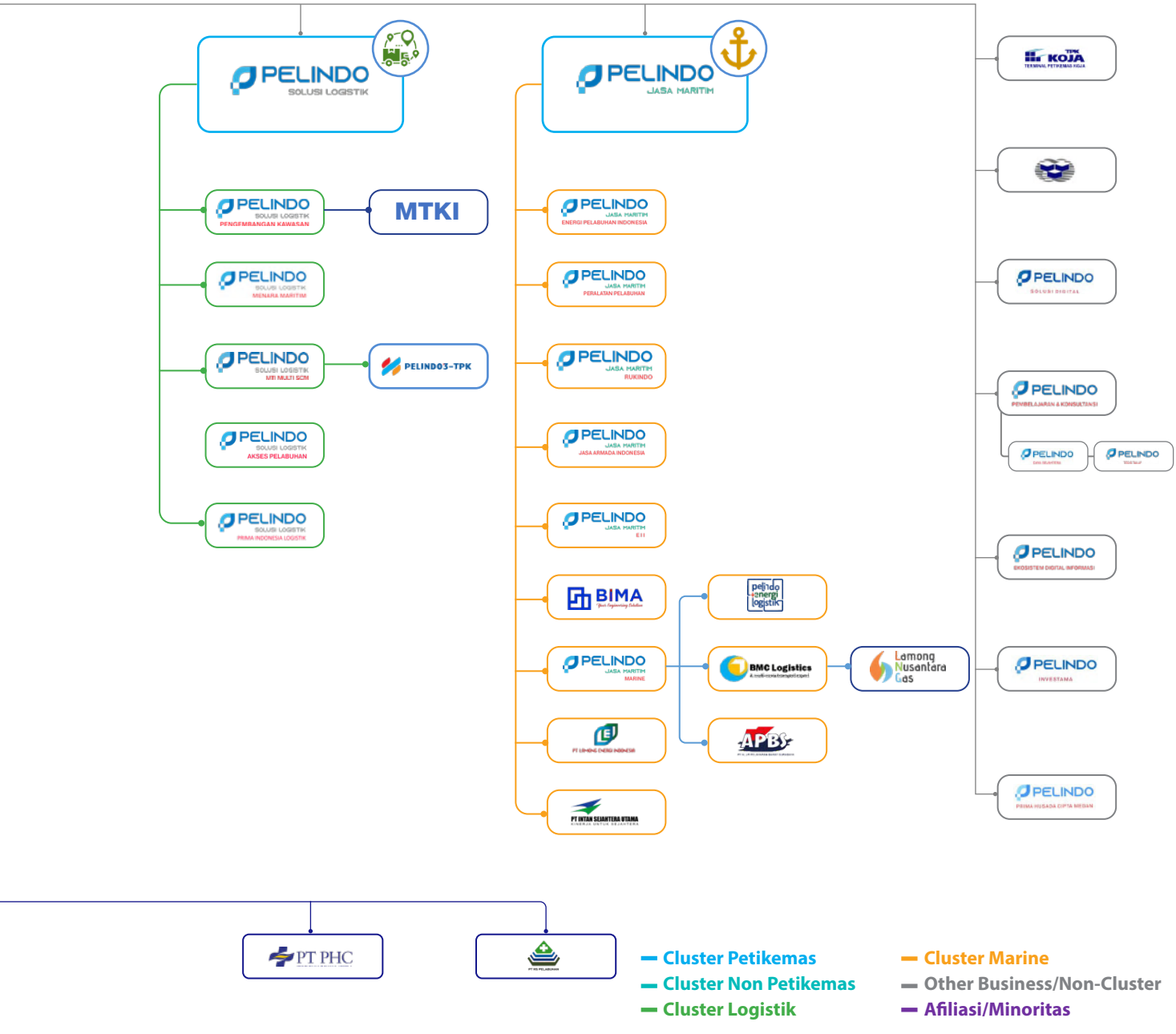

Kronologi Penerbitan Saham
Chronology of Share Issuance

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) per 31 Desember 2025 belum mencatatkan saham di Bursa Efek. Dengan demikian tidak terdapat informasi tentang kronologis pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama bursa efek dimana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatatkan, termasuk pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, pelaksanaan efek konversi, pelaksanaan penambahan dan pengurangan modal.

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) has not listed its shares on the Stock Exchange as of December 31, 2025. Therefore, there is no information to report regarding the chronology of share listings, the number of shares, the nominal value, and the offering price from the initial listing date to the end of the fiscal year, or the name of the stock exchange where the Issuer's or Public Company's shares are listed, including stock splits, reverse stock mergers, stock dividends, bonus shares, changes in share nominal value, conversion securities, capital increases and decreases.

Kronologis pendirian dan penerbitan saham Perseroan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Chronology of the Company's establishment and share issuance can be seen as follows:

No.	PP/ Akta No. dan Tanggal PP/ Deed No. and Date	Notaris Notary	Pengesahan Ratification	Keterangan Information
1	PP No. 57 Tahun 1991 Government Regulation No. 57 of 1991	-	-	Perum Pelabuhan II mengalami pengalihan bentuk menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Perum Pelabuhan II underwent a change in form to a Limited Liability Company (Persero).
2	Akta Pendirian No. 3 tanggal 1 Desember 1992 Deed of Establishment No. 3 dated December 1, 1992	Imas Fatimah, S.H	Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-4754. HT.01.01.TH.93 tanggal 17 Juni 1993 Republic of Indonesia Minister of Justice Decree No. C2-4754.HT.01.01. TH.93 dated June 17, 1993	Pendirian PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Establishment of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
3	Akta No. 4 tanggal 5 Mei 1998 Deed No. 4 dated May 5, 1998	Imas Fatimah, S.H	Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia No. C2-17612.HT.01.04.TH.98 tanggal 6 Oktober 1998 Minister of Law and Human Rights Decree No. C2-17612.HT.01.04.TH.98 dated October 6, 1998	Perubahan Anggaran Dasar Amendments to the Articles of Association
4	Akta No. 2 tanggal 15 Agustus 2008 Deed No. 2 dated August 15, 2008	Agus Sudiono Kuntjoro, S.H	Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-80894. AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 3 November 2008 Minister of Law and Human Rights Decree No. AHU-80894.AH.01.02.Year 2008 dated November 3, 2008	Perubahan Anggaran Dasar. Telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 12 Desember 2008 Amendments to the Articles of Association. Announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia dated December 12, 2008.

No.	PP/ Akta No. dan Tanggal PP/ Deed No. and Date	Notaris Notary	Pengesahan Ratification	Keterangan Information
5	Akta No. 3 tanggal 30 Juli 2009 Deed No. 3 dated July 30, 2009	Agus Sudiono Kuntjoro, S.H	Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-04026 tanggal 16 Februari 2010 Minister of Law and Human Rights Decree No. AHU-AH.01.10-04026 dated February 16, 2010	Perubahan Anggaran Dasar. Amendments to the Articles of Association.
6	Akta No. 12 tanggal 21 September 2012 Deed No. 12 dated September 21, 2012	Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Pua, S.H., M.Kn.,	Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-35061 tanggal 27 September 2012 Minister of Law and Human Rights Decree No. AHU-AH.01.10-35061 dated September 27, 2012	Perubahan Anggaran Dasar terakhir. Last amendments to the Articles of Association.
7	Akta Notaris No. 03 tanggal 02 Agustus 2013 Notarial Deed No. 03 dated August 2, 2013	Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn.,		Penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-38219 tanggal 12 September 2013 Increase in the Company's issued and fully paid-up capital, notified to the Republic of Indonesia Minister of Law and Human Rights through Notification Receipt Letter No. AHU-AH.01.10-38219 dated September 12, 2013.
8	Akta Notaris No. 03 tanggal 02 Agustus 2013 Notarial Deed No. 03 dated August 2, 2013	-	-	• Pemerintah Negara Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri BUMN menambah penyertaan modal ke dalam Perusahaan sebesar Rp426.418.000.000. • Dengan adanya penambahan modal Negara Republik Indonesia tersebut, maka modal ditempatkan/disetor Perseroan yang semula sebesar Rp1.017.611.000.000 menjadi sebesar Rp1.444.029.000.000 • Republic of Indonesia Government, represented by the Minister of SOEs, increased its capital participation in the Company to Rp426,418,000,000. • With the increase in capital by the Republic of Indonesia, the Company's issued/paid-up capital increased from Rp1,017,611,000,000 to Rp1,444,029,000,000.
9	Akta No. 09 tanggal 21 Agutus 2019 Deed No. 09 dated August 21, 2019	Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn.,	-	Perubahan Jenis Saham dan Perubahan Anggaran Dasar Changes in Share Type and Amendments to the Articles of Association

No.	PP/ Akta No. dan Tanggal PP/ Deed No. and Date	Notaris Notary	Pengesahan Ratification	Keterangan Information
10	Akta No. 06 tanggal 1 Oktober 2021 Deed No. 06 dated October 1, 2021	Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn.,	Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0053926.AH.01.02 tanggal 1 Oktober 2021 Minister of Law and Human Rights Decree No. AHU-0053926.AH.01.02 dated October 1, 2021	Perubahan Anggaran Dasar dan Penambahan Modal yang semula sebesar Rp1.444.029.000.000 menjadi Rp8.475.067.000.000 Changes to the Articles of Association and Capital Increase from Rp1,444,029,000,000 to Rp8,475,067,000,000
11	Akta No. 07 tanggal 1 Oktober 2021 Deed No. 07 dated October 1, 2021	Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn.,	Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0053936.AH.01.02 tanggal 1 Oktober 2021 Republic of Indonesia Minister of Law and Human Rights No. AHU-0053936. AH.01.02 dated October 1, 2021	Perubahan Nama, Perubahan Anggaran Dasar dan Logo Perusahaan Changes to the Company's Name, Articles of Association, and Logo
12	Akta No. 02 tanggal 9 Februari 2022 Deed No. 02 dated February 9, 2022	Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn.,	Keputusan Menteri BUMN Negara No. S-38/MBU/01/2022 Minister of SOE Decree No. S-38/MBU/01/2022	Perubahan Anggaran Dasar dan Penambahan Modal yang semula sebesar Rp8.475.067.000.000 menjadi Rp40.575.584.000.000 Changes to the Articles of Association and Capital Increase from Rp8,475,067,000,000 to Rp40,575,584,000,000

Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Efek Lainnya

Chronology of Other Securities Issuance and/or Listing

KRONOLOGI PENERBITAN DAN/ ATAU PENCATATAN OBLIGASI

CHRONOLOGY OF BOND ISSUANCE AND/OR LISTING

Tabel Kronologi Penerbitan Obligasi
Bond Issuance Chronology Table

No.	Uraian Description	Tanggal Penerbitan Date Issued	Tenor Tenor	Mata Uang Currency	Jumlah Obligasi (juta) Amount of Bonds (million)
1	Obligasi Domestik (PIGN A) Domestic Bond (PIGN A)	21 Juni 2016 June 21, 2016	3 Tahun 3 years	IDR	50.000
2	Obligasi Domestik (PIGN B) Domestic Bond (PIGN B)	21 Juni 2016 June 21, 2016	5 Tahun 5 years	IDR	500.000
3	Obligasi Domestik (PIGN C) Domestic Bond (PIGN C)	21 Juni 2016 June 21, 2016	7 Tahun 7 years	IDR	400.000
4	Obligasi Domestik (PIGN D) Domestic Bond (PIGN D)	21 Juni 2016 June 21, 2016	10 Tahun 10 years	IDR	50.000
5	Obligasi Global Global Bond	5 Mei 2015 June 21, 2016	10 Tahun 10 years	USD	1.100
6	Obligasi Global Global Bond	5 Mei 2015 June 21, 2016	30 Tahun 30 years	USD	500
7	Obligasi Global Global Bond	2 Mei 2018 May 2, 2018	5 Tahun 5 years	USD	500
8	Obligasi Global Global Bond	1 Oktober 2014 October 1, 2014	10 Tahun 10 years	USD	500
9	Obligasi Domestik (PIKI A) Domestic Bond (PIKI A)	5 Juli 2018 July 5, 2018	5 Tahun 5 years	IDR	380.000
10	Obligasi Domestik (PIKI B) Domestic Bond (PIKI B)	5 Juli 2018 July 5, 2018	7 Tahun 7 years	IDR	1.820.000
11	Obligasi Domestik (PIKI C) Domestic Bond (PIKI C)	5 Juli 2018 July 5, 2018	10 Tahun 10 years	IDR	800.000

	Harga Penawaran Offering Price	Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date	Tingkat Suku Bunga Interest Rate	Status Pembayaran Payment Status	Peringkat Rating		Wali Amanat Trustee
					2025	2024	
	100%	21 Juni 2019 June 21, 2019	8,25%	Lunas Paid	-	-	Bank Tabungan Negara (Persero)
	100%	21 Juni 2021 June 21, 2021	9%	Lunas Paid	-	-	Bank Tabungan Negara (Persero)
	100%	21 Juni 2023 June 21, 2023	9,50%	Lunas Paid	-	-	Bank Tabungan Negara (Persero)
	100%	21 Juni 2026 June 21, 2026	9,75%	Belum Lunas Not yet Paid	idAAA/ *Stable*	idAAA/ *Stable*	Bank Tabungan Negara (Persero
	98,99%	5 Mei 2025 May 5, 2025	4,25%	Lunas Paid	Moody's: Baa2 (*Stable outlook*) Fitch: BBB (Stable)	Moody's: Baa3 (*Stable outlook*) Fitch: BBB (Stable)	The Bank of New york Mellon
	98,17%	5 Mei 2045 May 5, 2045	5,38%	Belum Lunas Not yet Paid	Moody's: Baa2 (*Stable outlook*) Fitch: BBB (Stable)	Moody's: Baa3 (*Stable outlook*) Fitch: BBB (Stable)	The Bank of New york Mellon
	98,90%	2 Mei 2023 May 2, 2023	4,50%	Lunas Paid	-	-	The Bank of New york Mellon
	99,41%	1 Oktober 2024 October 1, 2024	4,88%	Lunas Paid	-	Moody's: Baa3 (*Stable outlook*) Fitch: BBB (Stable)	The Bank of New york Mellon
	100%	5 Juli 2023 July 5, 2023	8,00%	Lunas Paid	-	-	Bank Tabungan Negara (Persero
	100%	5 Juli 2025 July 5, 2025	9,15%	Lunas Paid	idAAA/ *Stable*	idAAA/ *Stable*	Bank Tabungan Negara (Persero
	100%	5 Juli 2028 July 5, 2028	9,35%	Belum Lunas Not yet Paid	idAAA/ *Stable*	idAAA/ *Stable*	Bank Tabungan Negara (Persero

Seluruh obligasi Domestik Perseroan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dan Obligasi Global Perseroan dicatatkan pada Singapore Stock Exchange (SGX).

KRONOLOGI PENERBITAN DAN/ ATAU PENCATATAN SUKUK

Sampai dengan 31 Desember 2025, Pelindo belum menerbitkan sukuk.

KRONOLOGI PENERBITAN DAN/ ATAU PENCATATAN OBLIGASI KONVERSI

Sampai dengan 31 Desember 2025, Pelindo belum menerbitkan obligasi konversi.

KRONOLOGI PENERBITAN DAN/ ATAU PENCATATAN SUMBER PENDANAAN LAINNYA

Per 31 Desember 2025, Pelindo tidak memiliki sumber pendanaan lainnya.

All of the Company's domestic bonds are listed on the Indonesia Stock Exchange, and the Company's global bonds are listed on the Singapore Stock Exchange (SGX).

CHRONOLOGY OF SUKUK ISSUANCE AND/OR LISTING

As of December 31, 2025, Pelindo has not issued any sukuk.

CHRONOLOGY OF CONVERTIBLE BONDS ISSUANCE AND/OR LISTING

As of December 31, 2025, Pelindo has not issued any convertible bonds.

CHRONOLOGY OF OTHER FUNDING SOURCES ISSUANCE AND/OR LISTING

As of December 31, 2025, Pelindo has no other funding sources.

Informasi Penggunaan Jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Pencatatan Efek Lainnya

Information On Using Public Accountant (AP) and Public Accounting Firm (KAP) Services

Nama KAP Name of Public Accounting Firm	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja
Jaringan Asosiasi Association Network	KAP Ernst & Young (EY)
Alamat KAP Address of Public Accounting Firm	Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II Lantai 7, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190
Nama AP Name of AP	Budi Hartono
Periode Penugasan KAP KAP Engagement Period	Penugasan Tahun ke - 12 12th Year Assignment
Periode Penugasan AP AP Engagement Period	Penugasan Tahun ke - 1 1th Year Assignment
Jasa Audit Audit Services	Audit Laporan Keuangan Financial Report Audit
Fee Audit Audit Fees	Rp14.570.000.000
Jasa Non Audit Non-Audit Services	Tidak memiliki jasa non-audit There are not offer non-audit services
Fee Non Audit Non-Audit Fees	Tidak memiliki fee non-audit There are no non-audit fees

Lembaga dan/atau Profesi Penunjang
Supporting Institutions and/or Professions

Pemeringkat Efek ? Pengelolaan Keuangan Securities Ratings	Fitch Ratings Singapore Pte Ltd. One Raffles Quay South Tower #22-11 Singapore 048583 Web: www.fitchratings.com
	Moody's Investors Service Singapore Pte. Ltd. 50 Raffles Place #23-06 Singapore Land Tower Singapore 048623 Web: http://www.moodys.com
	PEFINDO Equiy Tower 30th floor Sudirman Central Business District Lot 9 Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190, Indonesia Web: www.pefindo.com
Kustodian Custodian	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange Building - Tower I, 5th Floor Jakarta 12190 -Indonesia Web: www.ksei.co.id
Wali Amanat Trustee	BNY Mellon One Temasek Avenue #04-01 Millenia Tower, Singapore 039192 Web: www.bnymellon.com
	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Pusat Menara Bank BTN Jl. Gajah Mada No. I Jakarta Pusat 10130 Indonesia Web: www.btn.co.id
Notaris Notary	Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn Royal Palace Blok C/16 Jl. Prof. Dr. Soepomo No. 178A Jakarta Selatan Telp: (021) 8313356, 8313383 Fax: (021) 8313408 Email: nanda.fauz@gmail.com Web: -
Konsultan Hukum Legal Consultant	Kiagus Ahmad & Associates Menara Rajawali, Lt.8 Mega Kuningan Jakarta Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Lot 51, Kuningan Timur, Setiabudi Jakarta Selatan 12950 Telp: (021) 5762722
	KSR & Partners Graha Naysila, Jl. Pal Putih Nomor 194, Kramat, Senen, Jakarta Pusat Telp: 0813 6796 0170
	Redho Junaidi & Rekan Jl. Sukabangun II KM. 6,5 No. 1475A Wisma STIHPADA Sukabangun Sukarami Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan 30154 Telp: 0821 75714180
	Akmalsyah & Co. The Abisatya Lantai 2, Jl. Kalibata Utara II No. 25, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan 12740 Telp: 0816 1164066
	Saleh & Partners Soho Pancoran, Tower Splendor Lt. 23 Unit 2305-2306 Jl. Letjen M.T. Haryono No. Kav 2-3, Pancoran, Jakarta Selatan Telp: 0813 85472474
	Prestise Lawfirm Gedung Grand Slipi Tower LT 37 Unit K, Jl. Letjen S Parman Kav 22-24 RT 001 RW 004 Palmerah Jakarta Barat DKI Jakarta

	Arakata Law Firm Wijaya Grand Centre, Blok H-32, Jl. Wijaya II Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160 Telp: (021) 7210203
	Persekutuan Perdata Akmalsyah & Co. The Abisatya 2, Jl. Kalibata Utara II, No. 25 Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan – 12740
	ART Cooperation Jl. Ampasit No. 15 C, Cideng, Gambir Jakarta Pusat, DKI Jakarta
	Ginting & Reksodiputro The Energy Building 15th Floor SCBD Lot 11A Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Telp: (021) 29951700
	Assegaf Hamzah & Partners Capital Palace Level 36 dan 37, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta 12710 Telp: (021) 25557800
	Hadiputranto, Hadinoto & Partners The Indonesia Stock Exchange Buiding, Tower II, 21st Floor, Sudirman Central Business District, Jalan Jendral Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190 Telp: (021) 29608889

Penghargaan dan Sertifikasi
Awards and Certification

PENGHARGAAN

Nama Penghargaan:
100 Indonesia's Biggest Companies
100 Indonesia's Biggest Companies

Acara:
Indonesia's Biggest Companies 2025
Indonesia's Biggest Companies 2025

Penyelenggara:
Fortune Indonesia
Tanggal:
12 September 2025
September 12, 2025

Nama Penghargaan:
5 Star The Best Overall for GRC Performance Excellence 2025
5 Star The Best Overall for GRC Performance Excellence 2025

Acara:
GRC Leadership Award 2025
Penyelenggara:
Indonesia Business News

Tanggal:
12 November 2025
November 12, 2025

Nama Penghargaan:
Ucapan Terimakasih atas Partisipasi Dukungan Sosialisasi Pada Pemilihan Umum Serentak tahun 2024
Thank You for Your Participation and Support for Socialization in the 2024 Simultaneous General Elections

Acara:
Penghargaan dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Penyelenggara:
Penghargaan dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Republic of Indonesia General Elections Commission Award

Tanggal:
10 Februari 2025

Nama Penghargaan:
Penghargaan atas Dukungan dan Kolaborasi Terhadap Kelancaran Angkutan Laut Lebaran 2025
Appreciation for Support and Collaboration for the Smooth Running of Sea Transportation During the 2025 Lebaran

Acara:
Penghargaan dari Kementerian Perhubungan
Republic of Indonesia General Elections Commission Award

Penyelenggara:
Kementerian Perhubungan
Ministry of Transportation

Tanggal:
11 April 2025
April 11, 2025

AWARDS

Nama Penghargaan:
Innovation for Social Impact
Innovation for Social Impact

Acara:
Future Initiative Forum 2025
Penyelenggara:
Human Initiative
Tanggal:
11 Agustus 2025
August 11, 2025

Nama Penghargaan:

Acara:
Garuda Indonesia Kita Awards
Penyelenggara:
Garuda TV

Tanggal:
10 November 2025
November 10, 2025

Nama Penghargaan:
Leadership A – Advancing ESG Transparency Leadership
Leadership A – Advancing ESG Transparency Leadership

Acara:
Indonesia ESG Leadership Awards 2025
Indonesia ESG Leadership Awards 2025

Penyelenggara:
BGK Foundation

Tanggal:
12 November 2025
November 12, 2025

Nama Penghargaan:
Penghargaan atas Peran Serta Dalam Penyelamatan dan Pelestarian Arsip yang Bernilai Guna Pertanggungjawaban Nasional bagi Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara
Appreciation for Participation in the Rescue and Preservation of Valuable Archives for National Accountability for Society, Nation, and State Life

Acara:
Peghargaan dari Arsip Nasional Republik Indonesia
Appreciation from the Republic of Indonesia National Archives

Penyelenggara:
Arsip Nasional Republik Indonesia
Tanggal:
5 November 2025
November 5, 2025

Nama Penghargaan: Most Trusted Company Based on Corporate Governance Perception Index (CGPI) **Acara:** GCG Award 2025 Penyelenggara: IICG dan SWA **Tanggal:** 25 November 2025	Nama Penghargaan: Inspirasi Wirausaha & Ekonomi Kreatif Acara: Malam Apresiasi Menggerakkan Perusahaan Melalui Prestasi Nyata Penyelenggara: Berita Satu Tanggal: 27 November 2025
Award Name: Most Trusted Company Based on Corporate Governance Perception Index (CGPI) **Event:** GCG Award 2025 **Organizer:** IICG dan SWA Date: November 25, 2025	Award Name: Entrepreneurial Inspiration & Creative Economy Event: Appreciation Night: Motivating Companies Through Real Achievements Organizer: Berita Satu Date: November 27, 2025
Nama Penghargaan: Arif Suhartono as Top 100 CEO and The Future Leaders Forum 2025 Arif Suhartono as Top 100 CEO and The Future Leaders Forum 2025 **Acara:** Infobank Top CEO 2025 **Penyelenggara:** Infobank **Tanggal:** 8 Desember 2025 December 8, 2025	**Nama Penghargaan:** Drajat Sulistyo (Direktur Strategi) as Top 100 CEO and The Future Leaders Forum 2025 Drajat Sulistyo (Strategy Director) as Top 100 CEO and The Future Leaders Forum 2025 **Acara:** The 200 Future Leaders 2025 **Penyelenggara:** Infobank **Tanggal:** 8 Desember 2025 December 8, 2025
Nama Penghargaan: Arif Suhartono as The Best Industry Marketing Champion 2025 category Infrastructure, Utilities & Energy Arif Suhartono as The Best Industry Marketing Champion 2025 Infrastructure, Utilities & Energy category **Acara:** Marketer of The Year 2025 Marketer of The Year 2025 Penyelenggara: Mcorp **Tanggal:** 11 Desember 2025 December 11, 2025	**Nama Penghargaan:** PT Pelabuhan Indonesia (Persero) status INSTAR 2025 COMMITED sektor Transportasi & Logistik PT Pelabuhan Indonesia (Persero) INSTAR 2025 COMMITTED status in the Transportation & Logistics sector **Acara:** Indeks Integritas Bisnis Lestari 2025 Indeks Integritas Bisnis Lestari 2025 Penyelenggara: Tempo **Tanggal:** 12 Desember 2025 December 12, 2025
Nama Penghargaan: Badan Publik dengan Kualifikasi Informatif dalam Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 Kategori Badan Usaha Milik Negara Public Agency with Informative Qualifications in Monitoring and Evaluation of Public Information Disclosure in 2025 for State-Owned Enterprises **Acara:** Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Public Information Transparency Awards **Penyelenggara:** Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Central Information Commission of the Republic of Indonesia **Tanggal:** 15 Desember 2025 December 15, 2025	

SERTIFIKASI CERTIFICATION

Area	ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Quality Management System			
	Tipe Sertifikasi Type of Certification	**Badan Sertifikasi** Certification Body	**Tanggal Mulai Berlaku** Effective Date	**Tanggal Selesai Berlaku** Expiration Date
Kantor Pusat Head Office	**1**	**BSI Group Indonesia**	**24 Juni 2024** June 24, 2024	**23 Juni 2027** June 23, 2027
Kantor Regional 1 Regional 1 Branches	**1a**	**BSI Group Indonesia**	**24 Juni 2024** June 24, 2024	**23 Juni 2027** June 23, 2027
Kantor Regional 1 Regional 1 Branches	**1**	**BSI Group Indonesia**	**06 Maret 2024** March 06, 2024	**17 Januari 2027** January 17, 2027
Belawan	1a	TUV Nord Indonesia	6 Maret 2024 March 06, 2024	17 Januari 2027 January 17, 2027
Dumai	1a	TUV Nord Indonesia	6 Maret 2024 March 06, 2024	17 Januari 2027 January 17, 2027
Gunung Sitoli	1a	TUV Nord Indonesia	6 Maret 2024 March 06, 2024	17 Januari 2027 January 17, 2027
Kuala Tanjung	1a	TUV Nord Indonesia	6 Maret 2024 March 06, 2024	17 Januari 2027 January 17, 2027
Pekanbaru	1a	TUV Nord Indonesia	6 Maret 2024 March 06, 2024	17 Januari 2027 January 17, 2027
Sibolga	1a	TUV Nord Indonesia	6 Maret 2024 March 06, 2024	17 Januari 2027 January 17, 2027
Tanjung Balai Asahan	1a	TUV Nord Indonesia	6 Maret 2024 March 06, 2024	17 Januari 2027 January 17, 2027
Tanjung Balai Karimun	1a	TUV Nord Indonesia	6 Maret 2024 March 06, 2024	17 Januari 2027 January 17, 2027
Tanjungpinang SKK	1a	TUV Nord Indonesia	6 Maret 2024 March 06, 2024	17 Januari 2027 January 17, 2027
Tembilahan	1a	TUV Nord Indonesia	6 Maret 2024 March 06, 2024	17 Januari 2027 January 17, 2027
Kantor Regional 2 Regional 2 Branches	**1a**	**BSI Group Indonesia**	**24 Juni 2024** June 24, 2024	**23 Juni 2027** June 23, 2027
Kantor Regional 2 Regional 2 Branches	**1**	**Sucofindo**	**26 Februari 2024** February 26, 2024	**27 Desember 2027** December 27, 2027
Banten	1a	Sucofindo	26 Februari 2024 February 26, 2024	27 Desember 2026 December 27, 2027
Bengkulu	1a	Sucofindo	26 Februari 2024 February 26, 2024	27 Desember 2026 December 27, 2026
Cirebon	1a	Sucofindo	26 Februari 2024 February 26, 2024	27 Desember 2026 December 27, 2026
Jambi	1a	Sucofindo	26 Februari 2024 February 26, 2024	27 Desember 2026 December 27, 2026

Area	ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Quality Management System			
	Tipe Sertifikasi Type of Certification	**Badan Sertifikasi** Certification Body	**Tanggal Mulai Berlaku** Effective Date	**Tanggal Selesai Berlaku** Expiration Date
Palembang	1a	Sucofindo	26 Februari 2024 February 26, 2024	27 Desember 2026 December 27, 2026
Pangkal Balam	1a	Sucofindo	26 Februari 2024 February 26, 2024	27 Desember 2026 December 27, 2026
Panjang	1a	Sucofindo	26 Februari 2024 February 26, 2024	27 Desember 2026 December 27, 2026
Pontianak	1a	Sucofindo	26 Februari 2024 February 26, 2024	27 Desember 2026 December 27, 2026
Sunda Kelapa	1a	Sucofindo	26 Februari 2024 February 26, 2024	27 Desember 2026 December 27, 2026
Tanjung Pandan	1a	Sucofindo	26 Februari 2024 February 26, 2024	27 Desember 2026 December 27, 2026
Tanjung Priok	1a	Sucofindo	26 Februari 2024 February 26, 2024	27 Desember 2026 December 27, 2026
Teluk Bayur	1a	Sucofindo	26 Februari 2024 February 26, 2024	27 Desember 2026 December 27, 2026
Kantor Regional 3 Regional 3Branches	**1a**	**BSI Group Indonesia**	**24 Juni 2024** June 24, 2024	**23 Juni 2027** June 23, 2027
Kantor Regional 3 Regional 3Branches	**1**	**Global Certification Indonesia**	**6 Februari 2024** February 6, 2024	**05 Februari 2027** February 05, 2027
Sub Regional Jawa	1a	Global Certification Indonesia	6 Februari 2024 February 6, 2024	05 Februari 2027 February 05, 2027
Terminal Kalimas dan GSN	1a	Global Certification Indonesia	6 Februari 2024 February 6, 2024	05 Februari 2027 February 05, 2027
Tanjung Tembaga	1a	Global Certification Indonesia	6 Februari 2024 February 6, 2024	05 Februari 2027 February 05, 2027
Sub Regional Kalimantan	1a	Global Certification Indonesia	6 Februari 2024 February 6, 2024	05 Februari 2027 February 05, 2027
Kotabaru	1a	Global Certification Indonesia	6 Februari 2024 February 6, 2024	05 Februari 2027 February 05, 2027
Sampit	1a	Global Certification Indonesia	6 Februari 2024 February 6, 2024	05 Februari 2027 February 05, 2027
Kumai	1a	Global Certification Indonesia	6 Februari 2024 February 6, 2024	05 Februari 2027 February 05, 2027
Batulicin	1a	Global Certification Indonesia	6 Februari 2024 February 6, 2024	05 Februari 2027 February 05, 2027
Sub Regional Bali Nusra	1a	Global Certification Indonesia	6 Februari 2024 February 6, 2024	05 Februari 2027 February 05, 2027
Benoa	1a	Global Certification Indonesia	6 Februari 2024 February 6, 2024	05 Februari 2027 February 05, 2027
Kupang	1a	Global Certification Indonesia	6 Februari 2024 February 6, 2024	05 Februari 2027 February 05, 2027
Bima	1a	Global Certification Indonesia	6 Februari 2024 February 6, 2024	05 Februari 2027 February 05, 2027
Maumere	1a	Global Certification Indonesia	6 Februari 2024 February 6, 2024	05 Februari 2027 February 05, 2027

Area	ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Quality Management System			
	Tipe Sertifikasi Type of Certification	**Badan Sertifikasi** Certification Body	**Tanggal Mulai Berlaku** Effective Date	**Tanggal Selesai Berlaku** Expiration Date
Celukan Bawang	1a	Global Certification Indonesia	6 Februari 2024 February 6, 2024	05 Februari 2027 February 05, 2027
Kantor Regional 4 Regional 4 Branches	**1a**	**BSI Group Indonesia**	**24 Juni 2024** June 24, 2024	**23 Juni 2027** June 23, 2027
Biak	2	URS	14 Januari 2023 January 14, 2023	13 Januari 2026 January 13, 2026
Gorontalo	2	URS	25 Januari 2023 January 25, 2023	24 Januari 2026 January 24, 2026
Kendari	2	URS	11 Desember 2022 December 11, 2022	10 Desember 2025 December 10, 2025
Merauke	2	URS	10 Januari 2022 January 10, 2022	09 Januari 2025 January 09, 2025
Parepare	2	URS	08 November 2022 November 08, 2022	07 November 2025 November 07, 2025
Sorong	2	URS	16 Januari 2023 January 16, 2023	15 Januari 2026 January 15, 2026
Ternate	2	URS	30 Desember 2022 December 30, 2022	29 Desember 2025 December 29, 2025

Area	ISO 14001:2015 Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015 Environmental Management System			
	Tipe Sertifikasi Type of Certification	**Badan Sertifikasi** Certification Body	**Tanggal Mulai Berlaku** Effective Date	**Tanggal Selesai Berlaku** Expiration Date
Kantor Regional 1 Regional 1 Branches	**1**	**TUV Nord Indonesia**	**6 Maret 2024** March 6, 2024	**17 Januari 2027** January 17, 2027
Belawan	1a	TUV Nord Indonesia	6 Maret 2024 March 6, 2024	17 Januari 2027 January 17, 2027
Dumai	1a	TUV Nord Indonesia	6 Maret 2024 March 6, 2024	17 Januari 2027 January 17, 2027
Pekanbaru	1a	TUV Nord Indonesia	6 Maret 2024 March 6, 2024	17 Januari 2027 January 17, 2027
Sibolga	1a	TUV Nord Indonesia	6 Maret 2024 March 6, 2024	17 Januari 2027 January 17, 2027
Tanjung Balai Karimun	1a	TUV Nord Indonesia	6 Maret 2024 March 6, 2024	17 Januari 2027 January 17, 2027
Tanjungpinang SKK	1a	TUV Nord Indonesia	6 Maret 2024 March 6, 2024	17 Januari 2027 January 17, 2027
Kantor Regional 2 Regional 2 Branches	**1**	**TUV Nord Indonesia**	**15 Januari 2024** January 15, 2024	**14 Januari 2027** January 14, 2027
Banten	1a	TUV Nord Indonesia	15 Januari 2024 January 15, 2024	14 Januari 2027 January 14, 2027
Bengkulu	1a	TUV Nord Indonesia	15 Januari 2024 January 15, 2024	14 Januari 2027 January 14, 2027
Cirebon	1a	TUV Nord Indonesia	15 Januari 2024 January 15, 2024	14 Januari 2027 January 14, 2027

Area	ISO 14001:2015 Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015 Environmental Management System			
	Tipe Sertifikasi Type of Certification	Badan Sertifikasi Certification Body	Tanggal Mulai Berlaku Effective Date	Tanggal Selesai Berlaku Expiration Date
Jambi	1a	TUV Nord Indonesia	15 Januari 2024 January 15, 2024	14 Januari 2027 January 14, 2027
Palembang	1a	TUV Nord Indonesia	15 Januari 2024 January 15, 2024	14 Januari 2027 January 14, 2027
Pangkal Balam	1a	TUV Nord Indonesia	15 Januari 2024 January 15, 2024	14 Januari 2027 January 14, 2027
Panjang	1a	TUV Nord Indonesia	15 Januari 2024 January 15, 2024	14 Januari 2027 January 14, 2027
Pontianak	1a	TUV Nord Indonesia	15 Januari 2024 January 15, 2024	14 Januari 2027 January 14, 2027
Sunda Kelapa	1a	TUV Nord Indonesia	15 Januari 2024 January 15, 2024	14 Januari 2027 January 14, 2027
Tanjung Pandan	1a	TUV Nord Indonesia	15 Januari 2024 January 15, 2024	14 Januari 2027 January 14, 2027
Tanjung Priok	1a	TUV Nord Indonesia	15 Januari 2024 January 15, 2024	14 Januari 2027 January 14, 2027
Teluk Bayur	1a	TUV Nord Indonesia	15 Januari 2024 January 15, 2024	14 Januari 2027 January 14, 2027
Kantor Regional 3 Regional 3 Branches	**1**	**Global Certification Indonesia**	**6 Februari 2024** February 6, 2024	**05 Februari 2027** February 5, 2027
Sub Regional Jawa	1a	Global Certification Indonesia	6 Februari 2024 February 6, 2024	05 Februari 2027 February 5, 2027
Terminal Kalimas dan GSN	1a	Global Certification Indonesia	6 Februari 2024 February 6, 2024	05 Februari 2027 February 5, 2027
Sub Regional Kalimantan	1a	Global Certification Indonesia	6 Februari 2024 February 6, 2024	05 Februari 2027 February 5, 2027
Kotabaru	1a	Global Certification Indonesia	6 Februari 2024 February 6, 2024	05 Februari 2027 February 5, 2027
Sub Regional Bali Nusra	1a	Global Certification Indonesia	6 Februari 2024 February 6, 2024	05 Februari 2027 February 5, 2027
Benoa	1a	Global Certification Indonesia	6 Februari 2024 February 6, 2024	05 Februari 2027 February 5, 2027
Kantor Regional 4 Regional 4 Branches	-	-	-	-

Area	ISO 45001:2018 Sistem Manajemen K3 ISO 45001:2018 OHS Management System			
	Tipe Sertifikasi Type of Certification	Badan Sertifikasi Certification Body	Tanggal Mulai Berlaku Effective Date	Tanggal Selesai Berlaku Expiration Date
Kantor Pusat Head Office	**1**	**BSI Group Indonesia**	**23 Juli 2025** July 23, 2025	**22 Juli 2028** July 22, 2028
Kantor Regional 1 Regional 1 Branches	**1a**	**BSI Group Indonesia**	**23 Juli 2025** July 23, 2025	**22 Juli 2028** July 22, 2028
Kantor Regional 2 Regional 2 Branches	**1a**	**BSI Group Indonesia**	**23 Juli 2025** July 23, 2025	**22 Juli 2028** July 22, 2028

Kantor Regional 3 Regional 3 Branches	**1a**	**BSI Group Indonesia**	**23 Juli 2025** July 23, 2025	**22 Juli 2028** July 22, 2028
Terminal Kalimas dan GSN	2	TUV Nord Indonesia	06 Desember 2023 December 6, 2023	05 Desember 2026 December 5, 2026
Kantor Regional 4 Regional 4 Branches	**1a**	**BSI Group Indonesia**	**23 Juli 2025** July 23, 2025	**22 Juli 2028** July 22, 2028
Balikpapan	2	URS	24 Desember 2022 December 24, 2022	23 Desember 2025 December 23, 2025

Area	**ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan** ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System			
	Tipe Sertifikasi Type of Certification	**Badan Sertifikasi** Certification Body	**Tanggal Mulai Berlaku** Effective Date	**Tanggal Selesai Berlaku** Expiration Date
Kantor Pusat Head Office	**2**	**BSI Group Indonesia**	**07 Juli 2023** July 07, 2023	**06 Juli 2026** July 06, 2026
Kantor Regional 1 Regional 1 Branches	**2**	**BSI Group Indonesia**	**07 Juli 2023** July 07, 2023	**06 Juli 2026** July 06, 2026
Kantor Regional 2 Regional 2 Branches	**2**	**BSI Group Indonesia**	**07 Juli 2023** July 07, 2023	**06 Juli 2026** July 06, 2026
Kantor Regional 3 Regional 3 Branches	**2**	**BSI Group Indonesia**	**07 Juli 2023** July 07, 2023	**06 Juli 2026** July 06, 2026
Sub Regional Jawa	2	BSI	02 Maret 2022 March 02, 2022	01 Maret 2025 March 01, 2025
Sub Regional Kalimantan	2	BSI	02 Maret 2022 March 02, 2022	01 Maret 2025 March 01, 2025
Sub Regional Bali Nusra	2	BSI	02 Maret 2022 March 02, 2022	01 Maret 2025 March 01, 2025
Kantor Regional 4 Regional 4 Branches	**2**	**BSI Group Indonesia**	**07 Juli 2023** July 07, 2023	**06 Juli 2026** July 06, 2026

Area Sertifikat Certification Area	ISO 22301 Sistem Manajemen Kelangsungan Usaha ISO 27001 Information Security Management System			
	Tipe Sertifikasi Type of Certification	Badan Sertifikasi Certification Body	Tanggal Mulai Berlaku Effective Date	Tanggal Selesai Berlaku Expiration Date
Kantor Pusat Head Office	-	-	-	-
Kantor Regional 1 Regional 1 Branches	-	-	-	-
Kantor Regional 2 Regional 2 Branches	-	-	-	-
Kantor Regional 3 Regional 3 Branches	-	-	-	-
Sub Regional Jawa	2	International Certification Authority (ICA)	01 Mei 2025 May 01, 2025	01 Mei 2028 May 01, 2028
Benoa	2	International Certification Authority (ICA)	01 Mei 2025 May 01, 2025	01 Mei 2028 May 01, 2028
Kantor Regional 4 Regional 4 Branches	-	-	-	-

Keterangan:
1 :Area tersebut sebagai induk sertifikat
1a :Area tersebut sebagai yang diintegrasikan ke induk sertifikat
2 :Area tersebut sebagai single sertifikat

Note:
1 : The area is the parent of the certificate
1a : The area as integrated into the parent certificate
2 : The area as a single certificate

Area	Nama Sertifikasi Name of Certification	Badan Sertifikasi Certification Body	Tanggal Mulai Berlaku Effective Date	Tanggal Selesai Berlaku Expiration Date
Regional 1 Regional 1	**SMK3 PP NO 50 2012**	**Kementerian Ketenagakerjaan** Ministry of Manpower	**09 Juni 2023** June 09, 2023	**09 Juni 2026** June 09, 2026
Dumai	SMK3 PP NO 50 2012	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	06 Oktober 2025 October 06, 2025	06 Oktober 2028 October 06, 2028
Gunung Sitoli	SMK3 PP NO 50 2012	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	06 Oktober 2025 October 06, 2025	06 Oktober 2028 October 06, 2028
Kuala Tanjung	SMK3 PP NO 50 2012	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	22 April 2021 April 22, 2021	21 April 2024
Pekanbaru	SMK3 PP NO 50 2012	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	09 Juni 2023 June 09, 2023	09 Juni 2026
Tanjung Balai Asahan	SMK3 PP NO 50 2012	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	06 Oktober 2025 06 October 2025	06 Oktober 2028
Tanjung Balai Karimun	SMK3 PP NO 50 2012	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	20 September 2021 September 20, 2021	25 Agustus 2026
Tembilahan	SMK3 PP NO 50 2012	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	06 Oktober 2025 06 October 2025	06 Oktober 2028
TPK Belawan	SMK3 PP NO 50 2012	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	09 Juni 2023 June 09, 2023	09 Juni 2026

Area	Nama Sertifikasi Name of Certification	Badan Sertifikasi Certification Body	Tanggal Mulai Berlaku Effective Date	Tanggal Selesai Berlaku Expiration Date
Regional 2 Regional 2	**SMK3 PP NO 50 2012**	**Sucofindo** Sucofindo	**13 Mei 2022** May 13, 2022	**13 Mei 2025** May 13, 2025
Banten	SMK3 PP NO 50 2012	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	22 April 2024 April 22, 2024	22 April 2025 April 22, 2025
Cirebon	SMK3 PP NO 50 2012	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	17 September 2023 September 17, 2023	17 September 2027 September 17, 2027
Jambi	SMK3 PP NO 50 2012	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	22 April 2022 April 22, 2022	21 April 2025 April 21, 2025
Palembang	SMK3 PP NO 50 2012	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	17 September 2023 September 17, 2023	17 September 2027 September 17, 2027
Panjang	SMK3 PP NO 50 2012	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	17 September 2023 September 17, 2023	06 Agustus 2027 August 6, 2027
Pontianak	SMK3 PP NO 50 2012	PT Sucofindo	17 September 2023 September 17, 2023	17 September 2027 September 17, 2027
Tanjung Priok	SMK3 PP NO 50 2012	Biro Klasifikasi Indonesia Indonesian Classification Bureau	17 September 2023 September 17, 2023	17 Mei 2029 May 17, 2029
Teluk Bayur	SMK3 PP NO 50 2012	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	13 Mei 2022 May 13, 2022	13 Mei 2025 May 13, 2025

Area	Nama Sertifikasi Name of Certification	Badan Sertifikasi Certification Body	Tanggal Mulai Berlaku Effective Date	Tanggal Selesai Berlaku Expiration Date
Regional 3 Regional 3	**SMK3 PP NO 50 2012**	**TUV Rheinland** TUV Rheinland	**09 Juni 2023** June 9, 2023	**08 Juni 2026** June 8, 2026
Celukan Bawang	SMK3	PT MULTI SERTIFIKASI INDONESIA PT MULTI SERTIFIKASI INDONESIA	06 Agustus 2024 August 6, 2024	05 Agustus 2027 August 5, 2027
Gresik	SMK3 PP NO 50 2012	TUV Rheinland TUV Rheinland	13 Mei 2022 May 13, 2022	12 Mei 2025 May 12, 2025
Kotabaru	SMK3 PP NO 50 2012	TUV Rheinland TUV Rheinland	09 Juni 2023 June 9, 2023	08 Juni 2026 June 8, 2026
Kumai	SMK3 PP NO 50 2012	PT MULTI SERTIFIKASI INDONESIA PT MULTI SERTIFIKASI INDONESIA	06 Agustus 2024 August 6, 2024	05 Agustus 2027 August 5, 2027
Maumere	SMK3	PT MULTI SERTIFIKASI INDONESIA PT MULTI SERTIFIKASI INDONESIA	06 Agustus 2024 August 6, 2024	05 Agustus 2027 August 5, 2027
Tanjung Tembaga	SMK3 PP NO 50 2012	TUV Rheinland TUV Rheinland	09 Juni 2023 June 9, 2023	08 Juni 2026 June 8, 2026
Trisakti	SMK3 PP NO 50 2012	PT MULTI SERTIFIKASI INDONESIA PT MULTI SERTIFIKASI INDONESIA	06 Agustus 2024 August 6, 2024	05 Agustus 2027 August 5, 2027

Area	Nama Sertifikasi Name of Certification	Badan Sertifikasi Certification Body	Tanggal Mulai Berlaku Effective Date	Tanggal Selesai Berlaku Expiration Date
Regional 4 Regional 4				**Tidak Ada**
Gorontalo	SMK3 PP No. 50 2012	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	10 Juni 2026 June 10, 2026	10 Mei 2028 May 10, 2028
Samarinda	SMK3 PP No. 50 2012	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	10 Juni 2026 June 10, 2026	10 Mei 2028 May 10, 2028
Sorong	SMK3 PP No. 50 2012	Kementerian Ketenagakerjaan Ministry of Manpower	10 Juni 2026 June 10, 2026	10 Mei 2028 May 10, 2028

Area	Statement of Compliance of a Port Facility (SoCPF) Statement of Compliance of a Port Facility (SoCPF)		
	Badan Sertifikasi Name of Certification	Tanggal Mulai Berlaku Effective Date	Tanggal Selesai Berlaku Expiration Date
Regional 1 Regional 1			
Dumai	DirjenHubla	18 Maret 2021 March 18, 2021	18 Januari 2026 January 18, 2026
Lhokseumawe	DirjenHubla	21 Oktober 2021 October 21, 2021	05 September 2026 September 5, 2026
Malahayati	DirjenHubla	06 Oktober 2021 October 6, 2021	06 September 2026 September 6, 2026
Pekanbaru (TPK Perawang)	DirjenHubla	06 Oktober 2021 October 6, 2021	07 September 2026 September 7, 2026
Tanjung Balai Asahan	DirjenHubla	16 Maret 2021 March 16, 2021	18 Januari 2026 January 18, 2026
Tanjung Balai Karimun	DirjenHubla	20 September 2021 September 20, 2021	25 Agustus 2026 August 25, 2026
TPK Belawan	DirjenHubla	18/01/2021 January 18, 2021	22 Desember 2025 December 22, 2025
PT Prima Terminal Petikemas	DirjenHubla	18/01/2021 January 18, 2021	22 Desember 2025 December 22, 2025
Regional 2 Regional 2			
Banten	DirjenHubla	23 September 2025 September 23, 2025	22 Agustus 2030 August 22, 2030
Bengkulu	DirjenHubla	28 November 2024 November 28, 2024	12 Oktober 2029 October 12, 2029
Cirebon	DirjenHubla	23 September 2025 September 23, 2025	22 Agustus 2030 August 22, 2030
Jambi	DirjenHubla	05 September 2024 September 5, 2024	18 Agustus 2029 August 18, 2029
Palembang	DirjenHubla	15 Juli 2025 July 15, 2025	03 September 2030 September 3, 2030
Pangkal Balam	DirjenHubla	30 November 2020 November 30, 2020	08 Juli 2025 July 8, 2025
Tanjung Pandan	DirjenHubla	7 November 2024 November 7, 2024	25 Agustus 2029 August 25, 2029
Pontianak	DirjenHubla	23 Maret 2022 March 23, 2022	21 Oktober 2026 October 21, 2026

Area	Statement of Compliance of a Port Facility (SoCPF) Statement of Compliance of a Port Facility (SoCPF)		
	Badan Sertifikasi Name of Certification	**Tanggal Mulai Berlaku** Effective Date	**Tanggal Selesai Berlaku** Expiration Date
Panjang	DirjenHubla	31 Juli 2023 July 31, 2023	20 Maret 2028 March 20, 2028
Tanjung Priok	DirjenHubla	19 Desember 2023 December 19, 2023	18 Desember 2028 December 18, 2028
Teluk Bayur	DirjenHubla	29 Januari 2024 January 29, 2024	30 Oktober 2028 October 30, 2028
PT Indonesia Kendaraan Terminal	DirjenHubla	26 April 2023 April 26, 2023	24 Mei 2028 May 24, 2028
Terminal Kijing (Pontianak)	DirjenHubla	23 Maret 2022 March 23, 2022	21 Oktober 2026 October 21, 2026
Regional 3 Regional 3			
Benoa	DirjenHubla	30 Desember 2024 December 30, 2024	7 November 2029 November 7, 2029
Celukan Bawang	DirjenHubla	19 Mei 2023 May 19, 2023	24 April 2028 April 24, 2028
Kota Baru	DirjenHubla	27 Januari 2021 January 27, 2021	28 Desember 2025 December 28, 2025
Tanjung Mas	DirjenHubla	17 September 2021 September 17, 2021	23 Agustus 2026 August 23, 2026
Tanjung Intan	DirjenHubla	19 November 2021 November 19, 2021	11 Agustus 2026 August 11, 2026
Tenau	DirjenHubla	15 November 2024 November 15, 2024	30 Oktober 2029 October 30, 2029
Trisakti	DirjenHubla	23 Januari 2025 January 23, 2025	30 Desember 2029 December 30, 2029
Jamrud	DirjenHubla	19 November 2024 November 19, 2024	26 November 2029 November 26, 2029
TPK Banjarmasin	DirjenHubla	15 Februari 2024 February 15, 2024	22 Februari 2029 February 22, 2029
TPK Semarang	DirjenHubla	30 Juli 2024 July 30, 2024	16 Agustus 2029 August 16, 2029
Terminal Teluk Lamong	DirjenHubla	21 September 2020 September 21, 2020	01 September 2025 September 1, 2025
TPK Surabaya	DirjenHubla	1 Juli 2024 July 1 2024	8 Oktober 2029 October 8 2029
Regional 4 Regional 4			
Ambon	DirjenHubla	20 Desember 2022 December 20, 2022	14 Agustus 2027 August 14, 2027
Balikpapan	DirjenHubla	27 Maret 2024 March 27, 2024	17 Desember 2027 December 17, 2027
Biak	DirjenHubla	25 November 2024 November 25, 2024	30 September 2028 September 30, 2028
Bitung	DirjenHubla	27 Oktober 2021 October 27, 2021	28 Juni 2026 June 28, 2026

Area	Statement of Compliance of a Port Facility (SoCPF) Statement of Compliance of a Port Facility (SoCPF)		
	Badan Sertifikasi Name of Certification	**Tanggal Mulai Berlaku** Effective Date	**Tanggal Selesai Berlaku** Expiration Date
Gorontalo	DirjenHubla	13 Juli 2015 July 13, 2015	24 Juni 2025 June 24, 2025
Makassar	DirjenHubla	06 Juli 2015 July 6, 2015	15 April 2025 April 15, 2025
Makassar New Port	DirjenHubla	16 Maret 2020 March 16, 2020	16 Februari 2025 February 16, 2025
Manokwari	DirjenHubla	6 September 2024 September 6, 2024	13 Juli 2029 July 13, 2029
Parepare	DirjenHubla	15 Agustus 2022 August 15, 2022	31 Januari 2027 January 31, 2027
KKT	DirjenHubla	02 Januari 2025 January 2, 2025	03 Maret 2029 March 3, 2029
Samarinda	DirjenHubla	11 September 2024 September 11, 2024	7 August 2029 August 7, 2029
Tarakan	DirjenHubla	20 April 2022 April 20, 2022	14 Februari 2027 February 14, 2027
Ternate	DirjenHubla	05 Desember 2022 December 5, 2022	10 Juli 2027 July 10, 2027
TPK Makassar	DirjenHubla	15 Juni 2015 June 15, 2015	02 Juni 2025 June 2, 2025
TPK Bitung	DirjenHubla	27 Oktober 2021 October 27, 2021	21 Juni 2026 June 21, 2026

Informasi yang Tersedia di *Website*
Information Available on the Website

Ketersediaan informasi pada *website* mengacu pada Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik. Pelindo telah melengkapi *website* perusahaan dengan beberapa informasi penting seperti Informasi dengan alamat www.pelindo.co.id. Informasi pada *website* Pelindo terdiri dari:

1. Home, berisi informasi terkait Berita Pelindo, Grup Pelindo, Wilayah Operasional Pelindo, alamat perusahaan, serta informasi media sosial perusahaan.
   a. Profil, berisi informasi terkait Tentang Pelindo; Visi, Misi dan nilai-nilai Perusahaan; Entitas Bisnis dan Grup Usaha; Manajemen yang berisi profil Dewan Komisaris dan Direksi; Sejarah Pelindo; Struktur Organisasi Pelindo; Organ Perusahaan; serta profil Komite-Komite.

The availability of information on the website complies with OJK Regulation No. 8/POJK.04/2015 concerning Websites for Issuers or Public Companies. Pelindo has equipped its website with several important pieces of information, including information at www.pelindo.co.id. The information on Pelindo's website includes:

1. Home: information related to Pelindo News, Pelindo Group, Pelindo Operational Areas, Company addresses, and Company social media information.
   a. Profile: information related to Pelindo; Company Vision, Mission and Values; Business Entities and Business Groups; Management with the Board of Commissioners and Board of Directors profiles; History of Pelindo; Pelindo Organizational Structure; Company Organs; and profiles of the Committees.

b. GCG, berisi informasi terkait Pedoman GCG; Organ GCG yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Hak Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Nominasi dan Renumerasi, Komite Pemantau Manajemen Risiko, Sekretaris Perusahaan dan Satuan Pengawas Internal; Kode Etik Bisnis; serta *Whistleblowing System.*
c. Layanan, berisi informasi terkait Wilayah Kerja dan Kegiatan Utama Perseroan.
d. Hubungan Investor, berisi informasi terkait Laporan Tahunan selama 5 (lima) tahun yang dapat diunduh, Laporan Keberlanjutan, Laporan Keuangan, Investor Memo, Laporan RUPS, Obligasi, Perungkat Hutang dan *Outlook*.
e. Media & Publikasi, berisi informasi terkait Kabar Terbaru dan Siaran Pers.
f. TJSL (Tanggung Jawab Sosial Lingkungan).

b. GCG: information related to GCG Guidelines; The GCG organs including the General Meeting of Shareholders (GMS), Shareholders' Rights, Board of Commissioners, Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, Risk Management Monitoring Committee, Corporate Secretary and Internal Audit Unit; Code of Business Ethics; and Whistleblowing System.
c. Services: information related to the Company's Work Areas and Main Activities.
d. Investor Relations: information related to the Annual Reports for the past 5 (five) years that can be downloaded, Sustainability Reports, Financial Reports (including Quarterly Financial Reports), Investor Memo, GMS Reports, Bonds, Debt Ratings and Outlook.
e. Media and Publications: information related to Latest News and Press Releases
f. SER (Social Environmental Responsibility).

PELINDO
INDONESIA MARITIME GATEWAY

Sumber Daya Manusia

Human Capital

POINT
KSAAN
KTP/SIM/KK/
nya).
PASS

Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia
Human Capital Management Strategy

Visi, Misi, dan Strategi Fungsi SDM Pelindo untuk Menjawab Kebutuhan Transformasi Bisnis Perseroan
Pelindo's Human Capital Function Vision, Mission, and Strategy to Address the Company's Business Transformation Needs

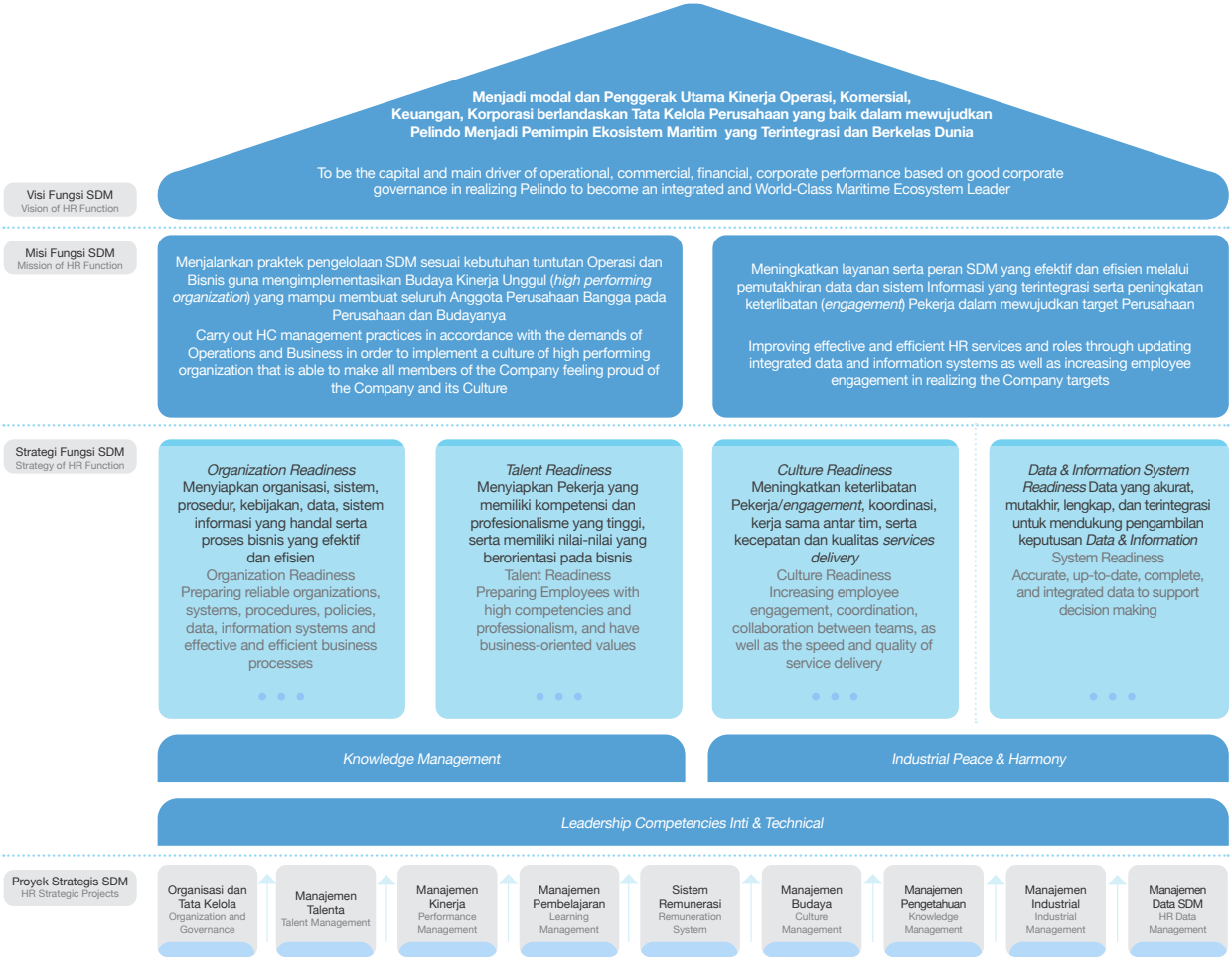

Roadmap Implementasi Program Strategis Fungsi SDM dalam Mendukung Visi Misi Periode 2022-2025.

Roadmap for Implementing Strategic HC Programs to Support the Vision and Mission for 2022-2025 Period.

PROJECT INITIATIVES

PROJECT INITIATIVES

Komponen Components	**Tahun 2022 (Integrasi dan Penyelarasan)** Alignment & Integration 2022 (Integration and Alignment)	**Tahun 2023 (Efisiensi HC Operation)** 2023 (HC Operations Efficiency)	**Tahun 2024 (Kapabilitas Data Analytics Analitik)** 2024 (Data Analytics Capabilities)	**Tahun 2025 (Ekspansi Global) 2025 (Global Expansion)**
Definition	Fokus pada integrasi kebijakan pengelolaan SDM beserta sistem pendukungnya Focus on integrating HC management policies and their supporting systems	Fokus pada kecepatan dan kualitas layanan SDM serta pemberdayaan SDM secara optimal Focus on the speed and quality of HC services and optimal HC empowerment	Fokus pada analisa data SDM untuk mendukung pengembangan usaha Focus on HC data analysis to support business development	Fokus pada pengembangan talenta dengan kompetensi standar global Focus on talent development with global competency standards
Programs	• Standarisasi nomenklatur, *grading system* dan prosedur • Kebijakan manajemen talenta • Kebijakan manajemen kinerja • Kebijakan manajemen remunerasi • Kebijakan pengelolaan hubungan industrial • Pembangunan *single* ERP • Standardization of nomenclature, grading systems, and procedures • Talent management policies • Performance management policies • Remuneration management policies • Industrial relations management policies • Development of a single ERP	• Implementasi nomenklatur dan *grading* baru • Implementasi seluruh kebijakan pengelolaan SDM • Automasi & sentralisasi layanan SDM melalui *share services* • *Culture & Change Management* • *Data cleansing & completing* • Pemetaan dan penyiapan alih profesi untuk penguatan SDM operasi • Pemetaan kegiatan usaha seluruh Anak Perusahaan AP dan restrukturisasi pengelolaan kegiatan usaha sejenis • Implementation of new nomenclature and grading • Implementation of all HC management policies • Automation and centralization of HC services through shared services • Culture & Change Management • Data cleansing and completion • Mapping and preparation for professional transfers to strengthen operational HC • Mapping of business activities across subsidiaries and restructuring the management of similar business activities	• *Online competency management* • *Organization health index* • *Logistic business academies program* • *Flexible benefit program* • *Employee self services apps* • *Integrated talent management system* • *HC dashboard & analytics* • *Employee satisfaction index* • *HR Scorecard* • *Best employer/ employee choice/HR excellence awards*	• *Global competency mindset* • *International competency standard* • *Global leadership program* • *International job swapping* • *Shared services center 2.0* • *HR automation (artificial intelligence & gamification)* • *ISO 30405, 30408, 30409: HRM recruitment, workforce planning & recruitment*
HC Capability	*Alignment & integration*	*HC service provider (service center)*	*Functional expert (center of excellence)*	*Strategic business partner*

Kebijakan dan Pelaksanaan Manajemen Sumber Daya Manusia

Human Capital Management Policies And Implementation

REKRUTMEN

KEBIJAKAN

Dalam rangka memenuhi kebutuhan SDM Perseroan guna mendukung pencapaian kinerja yang optimal, maka diselenggarakan proses Rekrutmen secara transparan dan terbuka. Rekrutmen dilaksanakan berdasarkan analisa kebutuhan pekerja sesuai formasi kebutuhan dari Divisi Strategi SDM Perseroan. Setiap orang, baik pria maupun wanita dengan tidak memandang latar belakang yang dimiliki calon pekerja, seperti suku, agama, ras, hingga kondisi fisik diberikan kesempatan yang sama untuk dapat mengikuti rekrutmen pekerja sepanjang memenuhi kriteria yang dipersyaratkan. Perseroan kemudian mengangkat calon pekerja dengan mengacu pada hasil seleksi, hasil evaluasi masa percobaan, serta pencapaian orientasi pekerja.

Tahapan pelaksanaan rekrutmen secara umum adalah sebagai berikut:

1. Pengumuman Pembukaan secara Terbuka;
2. Registrasi melalui Website;
3. Seleksi Administrasi;
4. Tes Berenang (untuk Jabatan Pandu);

RECRUITMENT

POLICY

To fulfill the Company's human capital needs in supporting optimal performance achievement, recruitment is conducted in a transparent and open manner. Recruitment is carried out based on workforce planning analysis in accordance with staffing requirements determined by the Company's Human Capital Strategy Division. All individuals, both men and women, are given equal opportunities to participate in the recruitment process regardless of their background, including ethnicity, religion, race, or physical condition, as long as they meet the required qualifications. The Company appoints candidates based on selection results, probation evaluation outcomes, and the achievement of employee orientation programs.

The general stages of recruitment process are as follows:

1. Open announcement of vacancies;
2. Registration through the website;
3. Administrative screening;
4. Swimming test (for Pilot positions);

5. Tes Seleksi Tahapan Pertama (Tes Potensi Akademik);
6. Tes Seleksi Tahapan Kedua (Psikotes dan Bahasa Inggris);
7. *Interview User*;
8. Tes Kesehatan; dan
9. *Interview* Direksi.

PELAKSANAAN REKRUTMEN

Pada Tahun 2025, Perseroan mengikuti Program Rekrutmen Bersama BUMN (RBB) yang diselenggarakan oleh Forum Human Capital Indonesia (FHCI) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (KBUMN). Pada Program RBB tersebut, Perseroan membuka lowongan untuk posisi *Officer* Bidang Proyek NPEA dan juga *Officer* Bidang Hukum di *Subholding* Pelindo Solusi Logistik. Informasi terkait rekrutmen disampaikan secara luas baik melalui *website* bersama FHCI KBUMN maupun *website* dan media sosial Perseroan, mulai dari pembukaan lowongan, seleksi, hingga hasil dari setiap tahapan seleksi. Melalui Rekrutmen Bersama BUMN tahun 2025, Perseroan mendapatkan 6 (enam) orang Pekerja dengan status PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu), yaitu sebanyak 2 (dua) orang sebagai *Officer* bidang Perencanaan Proyek NPEA, 2 (dua) orang sebagai *Officer* Bidang Konstruksi Proyek NPEA, dan 2 (dua) orang sebagai *Officer* Bidang Hukum Subholding Pelindo Solusi Logistik.

Selain melalui Rekrutmen Bersama BUMN, Perseroan juga melakukan Rekrutmen secara mandiri dan mendapatkan 4 (empat) orang pekerja dengan Status PKWT yaitu, 1 (satu) orang sebagai *Officer* Bidang Administrasi Proyek NPEA, 2 (dua) orang sebagai *Officer* Bidang Konstruksi Proyek Investasi Kijing, dan 1 (satu) orang sebagai *Officer* Bidang Perencanaan Proyek Investasi Kijing.

Selain Program Rekrutmen Bersama BUMN (RBB) dan Program Rekrutmen yang dilakukan secara mandiri oleh Perseroan, Pelindo juga berpartisipasi dalam penyelenggaraan Bakti Diaspora BUMN. Bakti Diaspora untuk Indonesia diperuntukan bagi WNI memiliki Ijazah Perguruan Tinggi Luar Negeri merupakan merupakan program Kementerian BUMN dan Delegasi BUMN dalam Upaya mendukung kemajuan SDM dan pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan menggerakan potensi Diaspora untuk berkarya di Perusahaan BUMN. Pada tahun 2025, terdapat 1 (satu) orang Pekerja status PKWT yang bergabung pada untuk ditugaskan sebagai *Supply Chain Analyst* yang ditempatkan pada *Subholding* Pelindo Solusi Logistik.

5. First-stage selection test (Academic Potential Test);
6. Second-stage selection test (Psychological test and English proficiency);
7. User interview;
8. Medical examination; and
9. Board of Directors interview.

Recruitment Implementation

In 2025, the Company participated in the Joint State-Owned Enterprises Recruitment Program (RBB) organized by the Indonesian Human Capital Forum (FHCI) under the Ministry of State-Owned Enterprises. Through this program, the Company opened vacancies for Officer positions in NPEA Project field and Legal Officer positions within Pelindo Logistics Solutions Subholding. Recruitment information was widely disseminated through FHCI Ministry website, as well as the Company's website and social media, covering vacancy announcements, selection processes, and results of each stage. Through the 2025 Joint Recruitment Program, the Company recruited 6 (six) employees under fixed-term employment contracts (PKWT), consisting of 2 (two) Officers in NPEA Project Planning, 2 (two) Officers in NPEA Project Construction, and 2 (two) Legal Officers in Pelindo Logistics Solutions Subholding.

Apart from the Joint Recruitment Program, the Company also conducted independent recruitment, resulting in 4 (four) employees under fixed-term employment contracts (PKWT), consisting of 1 (one) Officer in NPEA Project Administration, 2 (two) Officers in Kijing Investment Project Construction, and 1 (one) Officer in Kijing Investment Project Planning.

Furthermore, in addition to the Joint Recruitment Program and independent recruitment, Pelindo also participated in the SOE Diaspora Program (Bakti Diaspora BUMN). This program is intended for Indonesian citizens holding degrees from overseas universities and is initiated by the Ministry of SOEs to support human capital development and national economic growth by leveraging diaspora potential to contribute to SOEs. In 2025, 1 (one) employee under a fixed-term contract joined as a Supply Chain Analyst and was assigned to Pelindo Logistics Solutions Subholding.

PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

KEBIJAKAN

Dalam mendukung transformasi perusahaan sebagai operator pelabuhan dan ekosistem logistik terintegrasi kelas dunia, fungsi Pengelolaan Pembelajaran berperan sebagai *enabler* strategis dalam penguatan kapabilitas organisasi. Pendekatan pengembangan sumber daya manusia tidak lagi berfokus pada aktivitas pelatihan semata, melainkan pada pembentukan sistem pembelajaran yang terintegrasi, adaptif, dan berbasis kebutuhan bisnis. Sebagai wujud komitmen terhadap pengembangan sumber daya manusia, Perseroan memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh pekerja untuk mengikuti program pengembangan kompetensi sesuai dengan kebutuhan organisasi dan rencana pengembangan individu. Implementasi

Bidang Pengelolaan Pembelajaran mencakup tiga pilar utama, yaitu Program Pembelajaran, Program Manajemen Pengetahuan, dan Program Magang & Penelitian, yang secara sinergis membangun budaya belajar berkelanjutan (*continuous learning culture*) serta memastikan keberlanjutan pengetahuan dan talenta perusahaan.

PROGRAM PEMBELAJARAN

Kebijakan Pengembangan Kompetensi Pekerja diatur dalam Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor: HK.01/18/2/1/PSBL/UTMA/PLND-22 tanggal 18 Februari 2022 tentang Pembelajaran Pekerja di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Kebijakan ini menjadi landasan pelaksanaan pengembangan kompetensi yang terstruktur, terarah, dan selaras dengan kebutuhan strategis Perseroan.

Sepanjang tahun 2025, Perseroan terus memperkuat pengembangan kompetensi pekerja melalui sistem pembelajaran yang terstruktur, terukur, dan selaras dengan kebutuhan bisnis. Sebagai bagian dari komitmen Perseroan dalam membangun budaya belajar berkelanjutan, Perseroan menetapkan target minimum 50 *Learning Hours* per pekerja per tahun. Target tersebut dirancang untuk memastikan setiap insan perusahaan memperoleh kesempatan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan, baik melalui pelatihan dan sertifikasi yang dilaksanakan secara luring maupun daring, maupun melalui program pembelajaran berbasis akademi. Atas pelaksanaan program pembelajaran tersebut, Perseroan mencatat:

1. Total peserta pembelajaran: 6.716 orang
2. Total *Learning Hours*: 491.388 jam
3. Rata-rata *Learning Hours* per pekerja: 73 jam
4. Tingkat pencapaian terhadap target 50 jam: 80%

LEARNING MANAGEMENT

POLICY

In supporting the Company's transformation as a world-class integrated port operator and logistics ecosystem, the Learning Management function serves as a strategic enabler in strengthening organizational capabilities. The human resource development approach is no longer focused solely on training activities, but on building an integrated, adaptive, and business-needs-based learning system. As a manifestation of its commitment to human resource development, the Company provides equal opportunities for all employees to participate in competency development programs in accordance with organizational needs and individual development plans.

The Learning Management covers three main pillars, namely Learning Programs, Knowledge Management Programs, and Internship & Research Programs, which synergistically build a continuous learning culture and ensure the sustainability of company knowledge and talent.

LEARNING PROGRAM

The Employee Competency Development policy is regulated under the Board of Directors Regulation of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. HK.01/18/2/1/PSBL/UTMA/PLND-22 dated February 18, 2022 concerning Employee Learning within PT Pelabuhan Indonesia (Persero). This policy serves as the foundation for structured, directed competency development aligned with the Company's strategic needs.

Throughout 2025, the Company continued to strengthen employee competency development through a structured, measurable learning system aligned with business needs. As part of its commitment to building a continuous learning culture, the Company set a minimum target of 50 Learning Hours per employee per year. This target is designed to ensure that every employee has continuous access to competency development opportunities, both through offline and online training and certification programs, as well as academy-based learning programs. As a result of these learning programs, the Company recorded:

1. Total learning participants: 6,716 people
2. Total Learning Hours: 491,388 hours
3. Average Learning Hours per employee: 73 hours
4. Achievement level against the 50-hour target: 80%

LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAM

Dalam rangka mendukung kebutuhan keberlanjutan bisnis Perseroan, memastikan kesiapan suksesi pada posisi-posisi strategis, serta memperkuat kapasitas organisasi dalam menghadapi dinamika industri kepelabuhanan dan logistik global, Perusahaaan secara konsisten mengadakan *Accelerated Leadership Development Program for Pelabuhan Indonesia* (ALPI) sejak tahun 2021 hingga saat ini.

Program ini dirancang untuk memperkuat kepemimpinan transformasional di berbagai level jabatan melalui penguatan *leadership capabilities, global mindset dan strategic orientation* serta untuk memastikan kesiapan *pipeline* kepemimpinan yang adaptif dan mampu mendorong kinerja Perseroan secara berkelanjutan.

Pada tahun 2025, telah dilaksanakan *Accelerated Leadership Program for Pelabuhan Indonesia* (ALPI) *Cycle* 2 dengan total durasi 10 bulan yang diikuti oleh 30 peserta level manajerial madya dengan total 183,5 jam pembelajaran, serta 31 peserta level manajerial muda dengan total 181 jam pembelajaran.

Selain itu, perusahaan juga menjalankan *Global Apprenticeship Program* sebagai bagian dari keberlanjutan ALPI yang bertujuan untuk memberikan pengalaman lintas industri pada perusahaan global guna memperoleh *best practice*, memperluas perspektif strategis, adaptasi lintas budaya dan membangun jejaring profesional global. Program ini diikuti oleh 15 peserta selama 3 bulan yang dibagi ke 8 perusahaan global di Uni Arab Emirates, Tiongkok serta Korea Selatan.

SCHOLARSHIP HELPDESK PROGRAM PENDIDIKAN PASCASARJANA

Guna mendukung pegawai untuk mengembangkan pendidikan formal, Perseroan memfasilitasi pekerja dengan program *Scholarship Helpdesk*. *Scholarship Helpdesk* merupakan program bimbingan bagi para pegawai Pelindo yang bertujuan untuk mendapatkan beasiswa mandiri atau *sponsorship* dalam melanjutkan jenjang pendidikan formal pascasarjana S-2 atau S-3, khususnya pendidikan di luar negeri. Melalui program ini, Perseroan memberikan fasilitas pembekalan bahasa dan pembekalan persiapan mendapatkan beasiswa dan universitas. Para pegawai diberikan rekomendasi bidang studi dan universitas yang dipilih sesuai dengan kebutuhan Perseroan. Dengan adanya program *Scholarship Helpdesk* ini pada tahun 2025 pekerja yang berhasil mengikuti program studi pasca sarjana di luar negeri sebanyak 12 pekerja.

LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAM

In order to support the Company's business continuity needs, ensure succession readiness for strategic positions, and strengthen organizational capacity in facing global port and logistics industry dynamics, the Company has consistently implemented the Accelerated Leadership Development Program for Pelabuhan Indonesia (ALPI) from 2021 to the present.

This program is designed to strengthen transformational leadership across job levels through the development of leadership capabilities, global mindset, and strategic orientation, as well as to ensure a ready leadership pipeline that is adaptive and capable of driving sustainable Company performance.

In 2025, the Accelerated Leadership Program for Pelabuhan Indonesia (ALPI) Cycle 2 was conducted over a 10-month period, involving 30 mid-level managers with a total of 183.5 learning hours, and 31 junior managers with a total of 181 learning hours.

In addition, the Company also implemented the Global Apprenticeship Program as part of ALPI continuity, aimed at providing cross-industry experience in global companies to gain best practices, broaden strategic perspectives, strengthen cross-cultural adaptation, and build global professional networks. This program involved 15 participants over 3 months, placed in 8 global companies across the United Arab Emirates, China, and South Korea.

SCHOLARSHIP HELPDESK FOR POSTGRADUATE EDUCATION

To support employees in pursuing formal education, the Company facilitates employees through the Scholarship Helpdesk program. The Scholarship Helpdesk is a mentoring program for Pelindo employees aimed at obtaining self-funded scholarships or sponsorships to continue postgraduate education at Master's (S-2) or Doctoral (S-3) levels, particularly abroad. Through this program, the Company provides language preparation and scholarship and university application preparation support. Employees are also given recommendations for study fields and universities aligned with the Company's needs. In 2025, through this program, 12 employees successfully pursued postgraduate studies abroad.

CORE BUSINESS ACADEMIES & SUPPORTING ACADEMIES

Core Business Academies & Supporting Academies terus diperkuat melalui pengembangan modul pembelajaran yang terstruktur dan aplikatif guna mendukung standarisasi kompetensi teknis dan fungsional di seluruh organisasi. Pada Core Business Academies, modul yang dikembangkan meliputi *Crewing Management, Docking Management, Basic Ship Maintenance, Standard Marine Communication, Tug Operation, Basic Ship Operation, PNC for Break Bulk, PNC for Liquid Bulk, PNC for Dry Bulk, PNC for Roro Pure Car Carrier,* serta *Basic Warehouse*.

Sementara itu, *Supporting Academies* dilengkapi dengan pelaksanaan *Legal Academy* dan *Commercial Academy* untuk memperkuat aspek tata kelola dan kepatuhan dan pengembangan strategi komersial. Pendekatan ini memastikan *transfer knowledge* berjalan sistematis dan berdampak langsung pada peningkatan produktivitas serta kualitas layanan.

ENHANCEMENT PORTAVERSE LEARNING

Penguatan fitur dan pengalaman pengguna pada *Portaverse* meningkatkan aksesibilitas, integrasi *knowledge asset*, serta partisipasi *digital learning*. Transformasi ini mendukung pembelajaran yang lebih fleksibel, berbasis data, dan *scalable* di seluruh unit kerja, sekaligus memperkuat fondasi ekosistem pembelajaran digital perusahaan.

Pelaksanaan program pembelajaran sepanjang tahun 2025 didukung oleh alokasi anggaran yang terencana, dengan realisasi biaya sebagai berikut:

CORE BUSINESS ACADEMIES & SUPPORTING ACADEMIES

Core Business Academies and Supporting Academies continue to be strengthened through the development of structured and practical learning modules to support the standardization of technical and functional competencies across the organization.Within the Core Business Academies, developed modules include: Crewing Management, Docking Management, Basic Ship Maintenance, Standard Marine Communication, Tug Operation, Basic Ship Operation, PNC for Break Bulk, PNC for Liquid Bulk, PNC for Dry Bulk, PNC for RoRo Pure Car Carrier, and Basic Warehouse.

Meanwhile, the Supporting Academies include Legal Academy and Commercial Academy programs to strengthen governance, compliance, and commercial strategy development. This approach ensures systematic knowledge transfer that directly contributes to productivity improvement and service quality enhancement.

ENHANCEMENT OF PORTAVERSE LEARNING

Enhancements in features and user experience within Portaverse have improved accessibility, knowledge asset integration, and digital learning participation. This transformation supports more flexible, data-driven, and scalable learning across all units, while strengthening the foundation of the company's digital learning ecosystem.

The implementation of learning programs throughout 2025 was supported by a planned budget allocation, with realized costs as follows:

Keterangan **Description**	2025	2024
Pendidikan Formal Formal Education	**Rp256.028.465**	Rp395.121.234
Program Kepemimpinan & Budaya Leadership & Cultural Programs	**Rp29.456.951.980**	Rp9.840.003.000
Pelatihan & Seminar Training & Seminars	**Rp26.785.075.670**	Rp26.087.981.721
Sertifikasi Certification	**Rp2.570.219.365**	Rp5.887.230.500
Total Biaya Total Cost	**Rp59.068.275.480**	**Rp 42.210.336.455**

EVALUASI PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Dalam rangka mengukur dan mendukung pengembangan efektivitas Program Pembelajaran, maka dilaksanakan proses evaluasi sebagai berikut:

1. Guna mendukung pegawai untuk mengembangkan pendidikan formal, Perseroan menfasilitasi pegawai dengan program *Scholarship Helpdesk*. *Scholarship Helpdesk* merupakan program bimbingan bagi para pegawai Pelindo yang bertujuan untuk mendapatkan beasiswa mandiri atau *sponsorship* dalam melanjutkan jenjang pendidikan formal pascasarjana S-2 atau S-3, khususnya pendidikan di luar negeri. Melalui program ini, Perseroan memberikan fasilitas pembekalan bahasa dan pembekalan persiapan mendapatkan beasiswa dan universitas. Para pegawai diberikan rekomendasi bidang studi dan universitas yang dipilih sesuai dengan kebutuhan Perseroan.
2. Secara keseluruhan, Evaluasi program pelatihan di Pelindo *Group* bertujuan untuk memastikan bahwa pelatihan yang diselenggarakan dapat memberikan hasil yang optimal bagi karyawan maupun Perseroan dan harus bersifat menyeluruh dan berfokus pada dampak jangka panjang terhadap pengembangan karyawan dan peningkatan kinerja Perseroan. Dengan mengukur berbagai aspek seperti kualitas materi, efektivitas instruktur, metode pelatihan, dan dampak langsung terhadap kinerja. Hal ini akan mendukung tujuan strategis Perseroan untuk menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan siap menghadapi tantangan di industri pelabuhan dan logistik.

EVALUATION OF COMPETENCY DEVELOPMENT IMPLEMENTATION

In order to measure and support the effectiveness of the Learning Program development, an evaluation process is carried out as follows:

1. To support employees in developing formal education, the Company facilitates employees through the Scholarship Helpdesk program. The Scholarship Helpdesk is a mentoring program for Pelindo employees aimed at obtaining independent scholarships or sponsorships to continue postgraduate education at Master's (S-2) or Doctoral (S-3) levels, particularly overseas education. Through this program, the Company provides language preparation and scholarship and university application preparation support. Employees are given recommendations for fields of study and universities selected in accordance with the Company's needs.
2. Overall, the training program evaluation at Pelindo Group aims to ensure that the training conducted delivers optimal results for both employees and the Company, and must be comprehensive and focused on long-term impacts on employee development and Company performance improvement. This is achieved by measuring various aspects such as material quality, instructor effectiveness, training methods, and direct impact on performance. This supports the Company's strategic objective to create a competent workforce ready to face challenges in the ports and logistics industry.

PROGRAM MANAJEMEN PENGETAHUAN (*KNOWLEDGE MANAGEMENT*)

Manajemen Pengetahuan merupakan langkah strategis untuk mengelola dan memanfaatkan aset-aset intelektual yang dimiliki pekerja, meliputi pengetahuan mengenai *best practice*, *competitor* dan pelanggan, keterampilan, dan keahlian, pengalaman dan gagasan dari pekerja yang berkembang di dalam organisasi. Pengelolaan pengetahuan ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, memperkuat proses pembelajaran organisasi, serta mendorong terbentuknya budaya berbagi pengetahuan sebagai salah satu sumber keunggulan kompetitif Perseroan.

Kebijakan Manajemen Pengetahuan diatur dalam Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor: HK.01/15/2/1/PSBL/UTMA/PLND-22 tanggal 15 Februari 2022 tentang Pedoman *Knowledge Management* di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Pada tahun 2025, Perusahaan memiliki 713 orang subject *matter expert* dan 112 *community of practice*. Perusahaan melanjutkan penguatan praktik *Knowledge Management* sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan pengetahuan organisasi. Fokus penguatan diarahkan pada tiga inisiatif utama, yaitu *Updating Critical*

KNOWLEDGE MANAGEMENT PROGRAM

Knowledge Management is a strategic initiative to manage and utilize the intellectual assets owned by employees, including knowledge of best practices, competitors and customers, skills and expertise, experience, and ideas developed within the organization. The management of this knowledge aims to improve productivity, strengthen organizational learning processes, and foster a culture of knowledge sharing as one of the Company's sources of competitive advantage.

The Knowledge Management policy is regulated under the Board of Directors Regulation of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. HK.01/15/2/1/PSBL/UTMA/PLND-22 dated 15 February 2022 concerning the Knowledge Management Guidelines within PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

In 2025, the Company will have 713 subject matter experts and 112 communities of practice. The Company continued strengthening Knowledge Management practices as part of efforts to sustain organizational knowledge. The focus of strengthening is directed at three main initiatives: updating critical knowledge and knowledge taxonomy, developing

Knowledge dan *Knowledge Taxonomy*, Pengembangan Subject Matter Expert (SME) dan *Community of Practice* (CoP), serta Optimalisasi Komunitas Praktisi dan Sertifikasi Tenaga Pengajar Internal. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan pengalaman, keahlian dan pengetahuan yang dimiliki insan Perusahaan dapat terdokumentasi dengan baik serta dimanfaatkan secara kolektif dalam mendukung kinerja organisasi.

Subject Matter Experts (SMEs) and Communities of Practice (CoP), and optimizing practitioner communities and internal trainer certification. This approach ensures that the experience, expertise, and knowledge of employees are well documented and collectively utilized to support organizational performance.

Dalam rangka menjaga kesinambungan operasional, Perseroan menerapkan praktik *Knowledge Management* untuk memitigasi risiko kehilangan pengetahuan kritikal akibat rotasi jabatan, mobilitas pekerja, maupun masa purna tugas, serta untuk mengurangi ketergantungan pada individu tertentu dan memastikan keberlanjutan pemanfaatan *best practice* organisasi. Untuk itu, Perseroan secara berkala melakukan pembaruan pengetahuan kritikal melalui pemutakhiran *knowledge map,* berdasarkan pengetahuan yang terorganisir dalam *knowledge taxonomy.*

To maintain operational continuity, the Company implements Knowledge Management practices to mitigate the risk of losing critical knowledge due to job rotation, employee mobility, or retirement, as well as to reduce dependency on specific individuals and ensure continuity of best practice utilization. Therefore, the Company periodically updates critical knowledge through knowledge map updates based on knowledge organized in the knowledge taxonomy.

Daftar pengetahuan dalam *knowledge taxonomy* telah melalui proses standarisasi dan terklasifikasi ke dalam 16 (enam belas) bidang inti. Standarisasi ini dilakukan untuk membangun pengelompokan pengetahuan yang sistematis berbasis fungsi, proses, dan tingkat kompetensi, sebagai upaya Perseroan mempermudah akses terhadap pengetahuan organisasi, meningkatkan efektivitas pembelajaran lintas unit dan *subholding*, serta memperkuat pemanfaatan pengetahuan dalam mendukung kinerja Perseroan.

The knowledge taxonomy has been standardized and classified into 16 core areas. This standardization establishes systematic grouping of knowledge based on function, process, and competency level, to facilitate access to organizational knowledge, improve cross-unit and subholding learning effectiveness, and strengthen knowledge utilization in supporting Company performance.

Sepanjang tahun 2025, Perseroan terus memperkuat peran *Subject Matter Expert* (SME) sebagai penjaga dan pengembang keahlian teknis pada bidang masing-masing. SME tidak hanya berperan sebagai narasumber internal, tetapi juga sebagai penggerak proses *knowledge transfer,* pengembangan standar kompetensi, serta penyebarluasan *best practice* di lingkungan Perseroan. Penguatan peran tersebut dilaksanakan melalui berbagai program, antara lain workshop pembekalan SME, kegiatan *knowledge sharing*, pengembangan modul pembelajaran berbasis keahlian, serta keterlibatan SME sebagai fasilitator dan kontributor dalam program pembelajaran internal perusahaan.

Throughout 2025, the Company continued strengthening the role of Subject Matter Experts (SMEs) as custodians and developers of technical expertise in their respective fields. SMEs act not only as internal resource persons but also as drivers of knowledge transfer, competency standard development, and dissemination of best practices within the Company. This strengthening is carried out through various programs, including SME workshops, knowledge sharing activities, development of expertise-based learning modules, and SME involvement as facilitators and contributors in internal learning programs.

Sejalan dengan penguatan peran SME, Perseroan juga mengembangkan dan mengaktifkan *Community of Practice* (CoP) sebagai wadah kolaborasi dan diskusi profesional bagi insan perusahaan yang memiliki minat dan keahlian sejenis. Melalui CoP, pekerja didorong untuk saling bertukar pengalaman, berbagi pengetahuan, serta mendiskusikan berbagai tantangan operasional dalam rangka mendorong peningkatan kinerja dan inovasi di lingkungan Perseroan.

In line with the strengthening of SMEs, the Company also develops and activates Communities of Practice (CoP) as forums for collaboration and professional discussion among employees with similar interests and expertise. Through CoP, employees are encouraged to exchange experiences, share knowledge, and discuss operational challenges to improve performance and drive innovation within the Company.

Pada tahun 2025, Perusahaan memiliki 713 orang *subject matter expert* dan 112 *community of practice*. CoP difokuskan pada berbagai bidang fundamental yang mendukung bisnis perusahaan antara lain HSSE, inovasi, pengelolaan peralatan, serta operasional kepelabuhanan. Melalui forum ini, Perseroan mendorong terciptanya pembelajaran kolektif dan pertukaran praktik terbaik (*best practices*) yang dapat dimanfaatkan secara lebih luas oleh unit kerja dan entitas di lingkungan Pelindo *Group* melalui berbagi pengetahuan.

In 2025, The Company will have 713 subject matter experts and 112 communities of practice. CoP focused on key business-supporting areas including HSSE, innovation, equipment management, and port operations. Through this forum, the Company encourages collective learning and exchange of best practices that can be widely utilized across work units and entities within Pelindo Group.

Salah satu implementasi budaya berbagi pengetahuan lain diantaranya pelaksanaan Indonesia Port English Community (IPEC) dengan 15 sesi diskusi pembelajaran sepanjang tahun 2025 yang menghadirkan beragam pembicara dari pakar eksternal dari industri pelabuhan dan akademisi internasional, di antaranya praktisi internal Pelindo, akademisi dari Erasmus University Rotterdam, hingga profesional pekerja pelindo yang sedang menempuh studi di universitas-universitas luar negeri. Topik yang dibahas secara umum di antaranya pengembangan dan strategi industri kepelabuhanan & logistik, keberlanjutan serta tata kelola perusahaan, dan penguatan kompetensi akademik serta komunikasi profesional maritim. Melalui beragam topik tersebut, IPEC menjadi wadah pembelajaran kolaboratif yang memperkaya wawasan global, memperkuat literasi industri, serta meningkatkan kompetensi komunikasi profesional pekerja dalam mendukung pengembangan sektor kepelabuhanan.

One implementation of knowledge-sharing culture is the Indonesia Port English Community (IPEC), which conducted 15 learning discussion sessions throughout 2025 featuring various speakers from external experts in the port industry and international academics, including Pelindo internal practitioners, academics from Erasmus University Rotterdam, and Pelindo employees pursuing studies abroad. Topics discussed include port and logistics industry development and strategy, sustainability and corporate governance, as well as strengthening academic competence and maritime professional communication. Through these topics, IPEC serves as a collaborative learning platform that enriches global insights, strengthens industry literacy, and enhances employees' professional communication competencies.

Sebagai bagian dari penguatan kualitas pembelajaran internal, perusahaan melakukan optimalisasi komunitas praktisi serta peningkatan kompetensi tenaga pengajar internal. Dengan sertifikasi tenaga pengajar internal dan optimalisasi komunitas praktisi, perusahaan memastikan transfer knowledge yang terstandar, efektif, serta memperkuat kemandirian dan efisiensi pengembangan kompetensi.

As part of strengthening internal learning quality, the Company optimizes practitioner communities and improves internal trainer competencies. Through internal trainer certification and optimization of practitioner communities, the Company ensures standardized and effective knowledge transfer, while strengthening independence and efficiency in competency development.

Sebagai bagian dari penguatan budaya berbagi pengetahuan dan pembelajaran berkelanjutan, Perseroan menyelenggarakan LenKa (*Learning & Knowledge Anchor*) *Award* 2025 sebagai bentuk apresiasi kepada individu, unit kerja, dan komunitas yang menunjukkan komitmen tinggi dalam pengelolaan pembelajaran serta implementasi *knowledge management* secara nyata di lingkungan kerja. Pada tahun 2025, penghargaan diberikan dalam

As part of strengthening a knowledge-sharing and continuous learning culture, the Company organized the LenKa (Learning & Knowledge Anchor) Award 2025 as an appreciation for individuals, work units, and communities demonstrating strong commitment to learning management and knowledge management implementation. In 2025, awards were given in several strategic categories, including:

beberapa kategori strategis yang mencerminkan ekosistem pembelajaran perusahaan, antara lain:

1. ***Best Knowledge Sharing Story***, sebagai apresiasi atas praktik berbagi pengetahuan terbaik yang memberikan dampak nyata bagi unit kerja;
2. ***Most Active Learner* dan *Learner with the Most Relevant Courses,*** bagi individu dengan partisipasi pembelajaran paling aktif dan relevan;
3. ***Most Insightful Knowledge-to-Action Implementation***, untuk implementasi pembelajaran yang berhasil diterjemahkan menjadi aksi dan peningkatan kinerja;
4. ***Most Favourite LenKa Sharing Session***, berdasarkan apresiasi peserta terhadap sesi berbagi pengetahuan pada LenKa *Sharing Session*;
5. ***Best Pengelola Knowledge Management***, bagi unit yang menunjukkan konsistensi dalam pengelolaan KM;
6. ***Most Consistent Community of Practice***, untuk komunitas praktisi yang aktif dan berkelanjutan;
7. ***Best Internal Trainer***, sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi tenaga pengajar internal dalam transfer *knowledge*.

Inisiatif ini tidak hanya mendorong partisipasi aktif dalam berbagi pengetahuan, namun juga memastikan bahwa pembelajaran menghasilkan implementasi nyata yang berdampak pada peningkatan kinerja dan inovasi operasional.

PROGRAM MAGANG DAN PENELITIAN

Sebagai bagian dari komitmen Perusahaan dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia nasional dan memperkuat ekosistem industri maritim dan logistik, Perseroan secara konsisten menyelenggarakan Program Magang dan Penelitian yang memberikan kesempatan pembelajaran langsung di lingkungan kerja profesional.

Kebijakan pengelolaan program magang diatur dalam Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor: HK.01/25/2/1/PSBL/UTMA/PLND-22 tanggal 25 Februari 2022 tentang Program Magang dan Penelitian di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Pada tahun 2025, program magang dilaksanakan melalui tiga skema, yaitu:

1. **Magang Generasi Bertalenta (MAGENTA)** yang diinisiasi oleh **Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara** dengan total jumlah pemagang sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) orang;
2. **MagangHub** yang diinisiasi dan difasilitasi oleh **Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia** mulai bulan Oktober 2025 dengan total jumlah pemagang sebanyak 5 (lima) orang.
3. Magang Mandiri dimana magang melalui pengajuan individu atau kerja sama dengan institusi pendidikan, tanpa melalui platform tertentu, sesuai kebutuhan dan kebijakan perusahaan.

1. **Best Knowledge Sharing Story**, as a recognition of best knowledge sharing practices that have a real impact on the work unit;
2. **Most Active Learner and Learner with the Most Relevant Courses**, for individuals with the most active and relevant learning participation;
3. **Most Insightful Knowledge-to-Action Implementation,** for learning implementation that successfully translates into action and performance improvement;
4. **Most Favorite LenKa Sharing Session**, based on participants' appreciation of the knowledge sharing session at the LenKa Sharing Session;
5. **Best Knowledge Management Manager**, for units that demonstrate consistency in KM m**anagement;**
6. **Most Consistent Community of Practice**, for an active and sustainable community of practitioners;
7. **Best Internal Trainer**, as a form of recognition for the contribution of internal trainers in knowledge transfer.

This initiative not only encourages active participation in knowledge sharing but also ensures that learning results in tangible implementation that improves performance and operational innovation.

INTERNSHIP AND RESEARCH PROGRAM

As part of the Company's commitment to supporting national human resource development and strengthening the maritime and logistics industry ecosystem, the Company consistently implements Internship and Research Programs that provide direct learning opportunities in a professional work environment.

The internship program policy is regulated under the Board of Directors Regulation of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. HK.01/25/2/1/PSBL/UTMA/PLND-22 dated 25 February 2022 concerning Internship and Research Programs within PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

In 2025, the internship program was implemented through three schemes:

1. **Talented Generation Internship (MAGENTA)**, initiated by the **State-Owned Enterprise Regulatory Agency,** with a total of 220 (two hundred and twenty) interns;
2. **MagangHub**, initiated and facilitated by the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia, starting in October 2025, with a total of 5 (five) interns.
3. Independent Internship, where internships are submitted individually or in collaboration with educational institutions, without going through a specific platform, according to company needs and policies.

Melalui kedua program tersebut, siswa, mahasiswa dan *fresh graduate* memperoleh kesempatan untuk terlibat langsung dalam aktivitas operasional dan pendukung bisnis perusahaan. Peserta ditempatkan sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kebutuhan unit kerja, serta mendapatkan pendampingan dari mentor di bidangnya.

Through these programs, students, university students, and fresh graduates gain direct exposure to operational and business support activities. Participants are assigned according to their educational background and unit needs, with mentoring support provided.

Berdasarkan jenjang pemagangan, peserta magang pada tahun 2025 terdiri dari:

1. 590 orang pada jenjang *Fresh Graduate*
2. 665 orang pada jenjang Strata (D4, S1 & S2)
3. 69 orang pada jenjang Diploma (D3)
4. 51 orang pada jenjang SMA/SMK

Based on educational level, internship participants in 2025 consisted of:

1. 590 people at the Fresh Graduate level
2. 665 people at the Bachelor's level (D4, S1 & S2)
3. 69 people at the Diploma level (D3)
4. 51 people at the High School/Vocational High School level

Komposisi ini menunjukkan bahwa mayoritas peserta berasal dari jenjang pendidikan Strata dan *Fresh Graduate*, yang sejalan dengan kebutuhan kompetensi analitis, manajerial, dan teknis dalam mendukung proses bisnis perusahaan. Partisipasi peserta dari jenjang SMA dan Diploma turut memperkuat dukungan Perseroan terhadap pengembangan pendidikan vokasi dan peningkatan kesiapan kerja lulusan pendidikan menengah dan terapan.

This composition shows that most participants come from higher education and fresh graduate levels, aligned with analytical, managerial, and technical competency needs. The participation of participants from high school and diploma levels also strengthens the Company's support for the development of vocational education and increasing the work readiness of high school and applied education graduates.

Dari sisi gender, komposisi peserta magang pada tahun 2025 menunjukkan tingkat partisipasi yang inklusif, dengan 62% peserta perempuan dan 38% peserta laki-laki.

In terms of gender, the composition of internship participants in 2025 demonstrates an inclusive participation rate, with 62% female participants and 38% male participants.

Dominasi partisipasi perempuan dalam program magang mencerminkan meningkatnya minat dan kesiapan talenta perempuan untuk berkontribusi di industri kepelabuhanan dan logistik. Hal ini juga menjadi indikator positif atas komitmen Perseroan dalam mendorong kesetaraan kesempatan dan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif serta mendukung pengembangan kompetensi tanpa membedakan *gender*.

The predominance of female participation in the internship program reflects the increasing interest and readiness of female talent to contribute to the port and logistics industry. This also serves as a positive indicator of the Company's commitment to promoting equal opportunities and creating an inclusive work environment that supports competency development regardless of gender.

Sebagai bagian dari komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*), Perseroan secara berkala melakukan evaluasi atas pelaksanaan Program Magang melalui mekanisme umpan balik dua arah, yaitu dari peserta magang (pemagang) dan dari unit kerja pengguna (*user*). Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur efektivitas program, kualitas pembimbingan, kesesuaian penugasan, serta kontribusi peserta terhadap unit kerja.

As part of its commitment to continuous improvement, the Company periodically evaluates the implementation of the Internship Program through a two-way feedback mechanism, from both interns and user work units. This evaluation aims to measure program effectiveness, mentoring quality, assignment suitability, and participant contributions to the work unit.

Berdasarkan hasil Pelindo *Intern Experience Survey* tahun 2025 yang diberikan kepada peserta magang, program memperoleh skor rata-rata sebesar 3,73 dari skala 4,00. Aspek yang dinilai meliputi:

1. *Onboarding & Orientation Experience*
2. *Learning & Mentorship Experience*
3. *Work Environment & Culture*
4. *Engagement & Involvement*
5. *Overall Experience & Feedback*

Based on the results of the 2025 Pelindo Intern Experience Survey administered to intern participants, the program received an average score of 3.73 on a scale of 4.00. Aspects assessed include:

1. Onboarding & Orientation Experience
2. Learning & Mentorship Experience
3. Work Environment & Culture
4. Engagement & Involvement
5. Overall Experience & Feedback

Dari sisi unit kerja pengguna, hasil Pelindo *Intern Feedback Survey* tahun 2025 terhadap program magang menunjukkan skor rata-rata sebesar 3,64 dari skala 4,00. Penilaian difokuskan pada:
1. *Program Structure & Onboarding*
2. *Project Engagement & Learning Opportunities*
3. *Support & Resources*
4. *Mentoring & Interaction Process*
5. *Program Monitoring & Evaluation*

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa mayoritas responden menilai program memberikan pengalaman kerja yang relevan serta meningkatkan pemahaman terhadap proses bisnis kepelabuhanan dan logistik. Program ini juga memperoleh tingkat rekomendasi yang tinggi dari peserta maupun unit kerja, mencerminkan kepuasan atas kualitas pelaksanaan serta manfaat yang dirasakan secara langsung.

Sebagai bagian dari penguatan pengalaman pembelajaran dalam Program Magang, Perseroan menyelenggarakan *Visita De Maritimo* sebagai program pengayaan (*enrichment program*) bagi seluruh peserta magang. Program ini dirancang untuk memberikan pemahaman *end-to-end* mengenai proses bisnis kepelabuhanan dan logistik, sehingga peserta tidak hanya memahami fungsi unit penempatan masing-masing, tetapi juga memperoleh perspektif menyeluruh terhadap rantai nilai perusahaan. Melalui sesi pemaparan strategis dan kunjungan operasional, peserta dibekali wawasan mengenai peran pelabuhan dalam konektivitas nasional, transformasi layanan, serta standar keselamatan dan tata kelola yang diterapkan perusahaan.

Atas pelaksanaan program magang tersebut, Perseroan merealisasikan anggaran Program Magang tahun 2025 sebesar Rp6.224.774.775. Jumlah tersebut menunjukkan penurunan dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp6.990.459.821, sejalan dengan optimalisasi pengelolaan program dan efisiensi biaya tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan.

Selain magang, Perseroan memfasilitasi 7 judul penelitian sepanjang tahun 2025 yang dilaksanakan oleh mahasiswa dan akademisi dari berbagai jenjang dan perguruan tinggi. Topik penelitian mencerminkan keberagaman bidang kerja perusahaan, mulai dari keuangan dan tata kelola, sumber daya manusia, teknologi informasi, operasional pelabuhan, hingga keberlanjutan dan pengembangan bisnis. Keberagaman topik penelitian menunjukkan bahwa Perseroan menjadi objek kajian yang relevan dalam berbagai disiplin ilmu, sekaligus mempertegas peran perusahaan sebagai organisasi yang terbuka terhadap pengembangan pengetahuan dan inovasi.

From the perspective of the user work unit, the results of the 2025 Pelindo Intern Feedback Survey for the internship program showed an average score of 3.64 on a scale of 4.00. The assessment focused on:
1. Program Structure & Onboarding
2. Project Engagement & Learning Opportunities
3. Support & Resources
4. Mentoring & Interaction Process
5. Program Monitoring & Evaluation

The evaluation results showed that the majority of respondents assessed the program as providing relevant work experience and enhancing their understanding of port and logistics business processes. The program also received a high level of recommendations from both participants and work units, reflecting satisfaction with the quality of implementation and the direct benefits experienced.

As part of strengthening the learning experience within the Internship Program, the Company held Visita De Maritimo as an enrichment program for all interns. This program was designed to provide an end-to-end understanding of port and logistics business processes, so that participants not only understood the functions of their respective placement units but also gained a comprehensive perspective of the company's value chain. Through strategic presentation sessions and operational visits, participants gained insight into the role of ports in national connectivity, service transformation, and the company's safety and governance standards.

For the implementation of the internship program, the Company allocated Rp6,224,774,775 for the 2025 Internship Program. This represents a decrease compared to the Rp6,990,459,821 budget allocated in 2024, in line with program management optimization and cost efficiency efforts without compromising the quality of implementation.

In addition to internships, the Company is facilitating seven research projects throughout 2025, conducted by students and academics from various levels and universities. The research topics reflect the company's diverse field of work, ranging from finance and governance, human resources, information technology, port operations, to sustainability and business development. The diversity of research topics demonstrates that the Company is a relevant object of study across various disciplines, while also emphasizing the company's role as an organization open to knowledge development and innovation.

Beberapa judul penelitian tersebut di antaranya:

1. "Analisis Kesiapan Implementasi *Internal Control Over Financial Reporting* (ICOFR) Berdasarkan Elemen COSO *Framework*" oleh mahasiswa S1 Politeknik Negeri Jakarta;
2. "*Organizational Ambidexterity in SOEs: A Comparative Study in Indonesia, Malaysia, and Singapore*" oleh mahasiswa S3 Thunderbird School of Global Management, Arizona State University;
3. "Perancangan *Enterprise Architecture* pada Perusahaan Pelabuhan" oleh mahasiswa S2 Universitas Indonesia;
4. "*Reducing CO_2 Emissions in Indonesian Container Terminals: Cost-Effective Mitigation Strategies*" oleh mahasiswa S2 Delft University;
5. "Pengaruh *Job Insecurity* dan Kepuasan Kerja Terhadap Komitmen Organisasi Pekerja di PT Pelabuhan Indonesia" oleh mahasiswa S1 Universitas Negeri Jakarta;
6. "Proses Alih Media Arsip di PT Pelabuhan Indonesia (Persero)" oleh mahasiswa Universitas Indonesia;
7. "Analisis Implementasi Sistem Informasi Akuntansi pada SAP-*Financial Accounting* Menggunakan Delone&Mclean IS Success Model dengan Penambahan Kualitas Pengendalian Internal pada PT Pelabuhan Indonesia (Persero)" oleh mahasiswa S2 Universitas Telkom.

Penelitian-penelitian tersebut tidak hanya mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga memberikan perspektif akademis yang konstruktif dalam mendukung peningkatan kinerja dan transformasi perusahaan.

Some of the research titles include:

1. "Analysis of Readiness for Implementation of Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR) Based on COSO Framework Elements" by undergraduate students from the Jakarta State Polytechnic;
2. "Organizational Ambidexterity in SOEs: A Comparative Study in Indonesia, Malaysia, and Singapore" by doctoral students from the Thunderbird School of Global Management, Arizona State University;
3. "Enterprise Architecture Design in Port Companies" by graduate students from the University of Indonesia;
4. "Reducing CO_2 Emissions in Indonesian Container Terminals: Cost-Effective Mitigation Strategies" by a Master's student at Delft University;
5. "The Influence of Job Insecurity and Job Satisfaction on Workers' Organizational Commitment at PT Pelabuhan Indonesia" by a Bachelor's student at Jakarta State University;
6. "The Process of Media Transfer of Archives at PT Pelabuhan Indonesia (Persero)" by a student at the University of Indonesia;
7. "Analysis of Accounting Information System Implementation in SAP-Financial Accounting Using the Delone & McLean IS Success Model with Enhanced Internal Control Quality at PT Pelabuhan Indonesia (Persero)" by a Master's student at Telkom University.

These studies not only support the development of scientific knowledge but also provide a constructive academic perspective to support performance improvement and company transformation.

PENGEMBANGAN KARIR

CAREER DEVELOPMENT

KEBIJAKAN

POLICY

Pada tahun 2025 telah dilakukan finalisasi atas Omnibus Peraturan Direksi terkait Manajemen Talenta dan Pengeliolaan Karier Pekerja Perseroan yang merupakan penggabungan dari Peraturan Direksi yang terkait pengelolaan karier diantaranya Peraturan Direksi tentang Manajemen Talenta dan Suksesi, Peraturan Direksi tentang Pendelegasian Kewenangan Mutasi, Peraturan Direksi tentang Komite Talenta, dan Peraturan Direksi tentang Penugasan Pekerja di Lingkungan Grup Bisnis Pelindo. Omnibus Peraturan Direksi ini nantinya akan menjadi dasar untuk pelaksanaan pengelolaan talenta dan karier Pekerja Perseroan.

In 2025, the Omnibus Board of Directors Regulation regarding Talent Management and Career Management of the Company's Employees was finalized. This is a combination of the Board of Directors Regulations related to career management, including the Board of Directors Regulation on Talent Management and Succession, the Board of Directors Regulation on Delegation of Transfer Authority, the Board of Directors Regulation on the Talent Committee, and the Board of Directors Regulation on Employee Assignments within the Pelindo Business Group. This Omnibus Board of Directors Regulation will serve as the basis for implementing the Company's employee talent and career management.

Di tahun ini juga telah dilakukan finalisasi terhadap Perencanaan dan Mekanisme terkait Kenaikan Kelas Jabatan Pekerja General, Struktural, maupun Fungsional Perseroan yang akan menjadi *guideline* untuk Pelaksanaan Kenaikan Kelas Jabatan di tahun berikutnya.

This year, the Planning and Mechanisms related to Promotions for General, Structural, and Functional Employees were also finalized, which will serve as guidelines for the Implementation of Promotions in the following year.

PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KARIR

Pada tahun 2025, sebagai bagian dari tindak lanjut atas hasil pelaksanaan *Event Talent* di tahun 2024, Perseroan membuka kembali Program *Event Talent* kepada Pekerja Perseroan. Untuk kali ini, dikhususkan kepada Pekerja Perseroan yang pada tahun 2024 belum mengkuti program *Event Talent* secara lengkap, baik itu yang belum melakukan pengisian aspirasi karier ataupun rencana pengembangan individu. Hal ini penting untuk dilakukan dikarenakan hasil dari penjaringan aspirasi karier Pekerja menjadi salah satu referensi dalam melaksanakan program pengembangan karir pekerja yaitu mutasi pekerja.

Selain itu, pada tahun ini juga dikembangkan fitur *Job Bidding* pada aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Talenta Perseroan. Dengan pengembangan fitur ini, diharapkan *Job Bidding* dapat terlaksana dengan lebih efektif dan efisien, serta meningkatkan keakuratan data dan percepatan proses.

Dalam rangka pengembangan karir, tentunya Perseroan melaksanakan proses Alih Tugas ke berbagai posisi sesuai kebutuhan Perseroan kepada Pekerja yang memenuhi persyaratan untuk menduduki posisi tersebut, baik melalui pelaksanaan mutasi atau *Job Assignment* dan *Job Sharing*. Alih tugas ini dilakukan baik untuk pemenuhan posisi jabatan lowong, penataan SDM dalam serah terima operasi, *replacement* dari perubahan struktur organisasi Subholding, Regional, ataupun unit lainnya di bawah Holding. Adanya Restrukturisasi Organisasi Kantor Pusat pada Oktober 2025, memerlukan dilakukannya penyesuaian penempatan pekerja Kantor Pusat sesuai dengan Struktur Organisasi baru tersebut sehingga diterbitkan SK Alih Tugas sebanyak 623 Pekerja untuk kegiatan tersebut.

PENILAIAN KINERJA

KEBIJAKAN

Kebijakan terkait pengelolaan kinerja berdasarkan pada Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor: HK.01/15/8/1/KPIU/UTMA/PLND-22 tanggal 15 Agustus 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Individu di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor: HK.01/25/1/2/KPIU/UTMA/PLND-24 tanggal 25 Januari 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor HK.01/15/8/1/KPIU/UTMA/PLND-22 tanggal 15 Agustus 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Individu di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Pelindo secara berkala melakukan review dan penilaian terhadap pencapaian

IMPLEMENTATION OF CAREER DEVELOPMENT

In 2025, as a follow-up to the results of the 2024 Talent Event, the Company reopened the Talent Event Program to its employees. This time, it is specifically for Company employees who have not yet fully participated in the Talent Event program in 2024, including those who have not yet completed their career aspirations or individual development plans. This is crucial because the results of employee career aspiration assessment serve as a reference for implementing employee career development programs, including employee transfers.

Furthermore, this year, a Job Bidding feature was developed within the Company's Talent Management Information System application. This feature is expected to make Job Bidding more effective and efficient, as well as improve data accuracy and accelerate the process.

For career development purposes, the Company conducts a transfer process for employees who meet the requirements to various positions according to the Company's needs, either through transfers, job assignments, or job sharing. This transfer is aimed to fill vacant positions, manage human capital during operational handovers, or replace changes in the organizational structure of subholdings, regional offices, or other units within the holding. The Head Office organizational restructuring in October 2025 required adjustments to the placement of Head Office employees in accordance with the new organizational structure, resulting in the issuance of a Transfer Decree for 623 employees for this activity.

PERFORMANCE ASSESSMENT

POLICY

Policies related to performance management are based on Regulation of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Number: HK.01/15/8/1/KPIU/UTMA/PLND-22 dated August 15, 2022 Concerning Guidelines for Individual Performance Management within PT Pelabuhan Indonesia (Persero) and Regulation of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Number: HK.01/25/1/2/KPIU/UTMA/PLND-24 dated January 25, 2024 on Amendments to Regulation of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Number HK.01/15/8/1/KPIU/UTMA/PLND- 22 dated August 15, 2022 Concerning Guidelines for Individual Performance Management within PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

kinerja individu Pekerja berdasarkan target dan realisasi pada ukuran kinerja individu yang ditetapkan melalui cascading dari *key performance individu* (KPI) Korporat. Penilaian kinerja individu dilakukan kepada seluruh (100%) pekerja Perseroan sesuai dengan ukuran kinerja masing-masing yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil penilaian kinerja tersebut menjadi salah satu dasar dalam pemberian apresiasi kepada Pekerja atas kinerja yang dihasilkan selama tahun berjalan.

Selain itu, hasil penilaian kinerja individu akan menjadi salah satu dasar dalam menentukan perjalanan karir pekerja seperti mutasi/rotasi, promosi, dan juga demosi. Penilaian kinerja individu terus diupayakan untuk dilakukan secara objektif tanpa membedakan suku, agama, jenis kelamin, pandangan politik, dan sebagainya. Melalui proses penilaian kinerja individu yang adil, objektif, dan transparan, Perseroan optimis akan tercipta lingkungan kerja yang sehat, menumbuhkan kepuasan Pekerja, serta mendorong motivasi Pekerja untuk terus meningkatkan kinerja individu dan kinerja perusahaan.

PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA

Pada tahun 2024 telah dilaksanakan implementasi standarisasi pengelolaan kinerja individu di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) kepada seluruh pekerja yang berada pada unit kerja Kantor Pusat, Regional, Cabang, *Subholding* dan Anak Perusahaan *Subholding*. Implementasi dimaksud dilakukan dengan harapan agar pekerja dapat memahami dengan baik terkait pedoman pengelolaan kinerja individu yang berlaku di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Selain itu, kalibrasi atas hasil penilaian kinerja individu bertujuan untuk memastikan bahwa penilaian yang dilakukan terhadap kinerja pekerja bersifat adil, objektif, dan konsisten. Proses ini juga digunakan untuk melihat keterkaitan antara capaian kinerja individu dengan kinerja Perusahaan. Dengan proses kalibrasi yang efektif, Perusahaan dapat mengoptimalkan pengelolaan talenta, meningkatkan motivasi karyawan, dan mencapai tujuan bisnis dengan lebih baik.

Pelindo periodically reviews and assesses individual employee performance achievements based on targets and realization of individual performance measures determined through cascading of corporate key individual performance (KPI). Individual performance assessments are carried out on all (100%) of the Company's employees in accordance with their respective performance measures that have been previously determined. The results of performance assessment become one of the bases for giving appreciation to employees for the performance produced during the current year.

Apart from that, the results of individual performance assessments will be one of the basis in determining employee's career paths such as transfers/rotations, promotions and also demotions. Efforts continue to be made to assess individual performance objectively without distinguishing between ethnicity, religion, gender, political views, and so on. Through a fair, objective and transparent individual performance assessment process, the Company is optimistic that it will create a healthy work environment, foster employee satisfaction, and encourage employee motivation to continue to improve individual performance and Company performance.

PERFORMANCE ASSESSMENT IMPLEMENTATION

In 2024, the implementation of standardization for individual performance management at PT Pelabuhan Indonesia (Persero) was carried out for all employees within the Head Office, Regional Offices, Branches, Subholdings, and Subholding's Subsidiaries. The implementation was carried out with the hope that employees could fully understand the guidelines for individual performance management that apply within PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Additionally, the calibration of individual performance assessment results aims to ensure that the evaluations of employee performance are fair, objective, and consistent. This process is also used to assess the relationship between individual performance achievements and the Company's overall performance. With an effective calibration process, the Company can optimize talent management, enhance employee motivation, and achieve business goals more effectively.

REMUNERASI

KEBIJAKAN

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dengan Visi menjadi "Pemimpin ekosistem maritim terintegrasi dan berkelas dunia", berkomitmen untuk secara konsisten memberikan kesejahteraan bagi para Pekerja. Perusahaan menerapkan kebijakan remunerasi yang terintegrasi sebagai bagian dari strategi pengelolaan sumber daya manusia untuk mendukung pencapaian kinerja, keberlanjutan usaha, serta penciptaan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan. Pemberian remunerasi, fasilitas dan kesejahteraan pekerja pascakerja oleh Perusahaan pasca penggabungan ditetapkan melalui Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor HK.01/1/10/1/HUKU/UTMA/PLND-21 tanggal 01 Oktober 2021 Tentang Pemberlakuan Sementara Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), dan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Pada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor HK.01/15/10/1/KIRF /UTMA/PLND-21 tanggal 15 Oktober 2021 tentang Penggunaan Kebijakan Remunerasi, Fasilitas, Benefit, dan Kesejahteraan Paska Kerja PT Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV (Persero) oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero), serta Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor: HK.01/22/1/3/KIRF/UTMA/PLND-24 tanggal 22 Januari 2024 tentang Sistem Pengupahan Pekerja Pasca Penggabungan Perusahaan di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan Perjanjian Kerja Bersama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Periode Tahun 2023 – 2025 Nomor: KP.08.03/10/11/2/HBUP/UTMA/PLND-23 dan Nomor: 01/XI/SKEP/SPPI-B/2023 tanggal 10 November 2023.

PELAKSANAAN REMUNERASI

Pelaksanaan remunerasi pada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) pada prinsipnya berlandaskan pada tiga aspek dasar yaitu: *Pay for Person, Pay for Position* dan *Pay for Performance* dengan memperhatikan kompetensi dan kapabilitas individu, bobot serta tanggung jawab jabatan, serta capaian kinerja individu dan kontribusi terhadap kinerja perusahaan. Selain itu, pemberian remunerasi oleh Perusahaan tidak hanya dalam bentuk bulanan, Perusahaan juga memberikan tunjangan dan benefit lainnya dalam rangka meningkatkan motivasi Pekerja untuk mencapai produktivitas optimal. Dengan pendekatan tersebut, Perusahaan memastikan bahwa sistem remunerasi tidak hanya berfungsi sebagai alat kompensasi, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mendorong kinerja, memperkuat engagement pekerja sekaligus membangun budaya kinerja tinggi.

Dalam rangka pemenuhan kepatuhan tata kelola yang baik, kebijakan remunerasi disusun dan dievaluasi secara berkala dengan mempertimbangkan regulasi yang berlaku, kondisi

REMUNERATION

POLICY

PT Pelabuhan Indonesia (Persero), with its vision of becoming a "world-class, integrated maritime ecosystem leader," is committed to consistently providing employee welfare. The Company applies an integrated remuneration policy as part of its human resource management strategy to support performance achievement, business sustainability, and long-term value creation for all stakeholders. The provision of remuneration, facilities and welfare of retired employees by the Company after the merger is stipulated through the Regulation of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Number HK.01/1/10/1/HUKU/UTMA/PLND-21 dated October 1, 2021 concerning the Temporary Implementation of the Regulation of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), and PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) at PT Pelabuhan Indonesia (Persero) and the Regulation of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Number HK.01/15/10/1/KIRF/UTMA/PLND-21 dated October 15, 2021 concerning the Use of Remuneration Policy, Facilities, Benefits, and Post-Employment Welfare of PT Pelabuhan Indonesia I, II, III and IV (Persero) by PT Pelabuhan Indonesia (Persero), as well as the Regulation of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Number: HK.01/22/1/3/KIRF/UTMA/PLND-24 dated January 22 2024 concerning the Post-Merger Wage System for Employees within PT Pelabuhan Indonesia (Persero) and the Collective Labor Agreement of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) for the 2023-2025 Period Number: KP.08.03/10/11/2/HBUP/UTMA/PLND-23 and Number: 01/XI/SKEP/SPPI-B/2023 dated November 10, 2023.

REMUNERATION IMPLEMENTATION

Remuneration at PT Pelabuhan Indonesia (Persero) is principally implemented based on three basic aspects: Pay for Person, Pay for Position, and Pay for Performance, taking into account individual competencies and capabilities, the weight and responsibilities of the position, as well as individual performance achievements and contributions to company performance. Furthermore, the Company provides remuneration not only in the form of monthly payments; the Company also provides allowances and other benefits to increase employee motivation to achieve optimal productivity. With this approach, the Company ensures that the remuneration system serves not only as a compensation tool but also as a strategic instrument for driving performance, strengthening employee engagement, and building a high-performance culture.

To comply with good governance, the remuneration policy is formulated and periodically evaluated, taking into account applicable regulations, industry conditions,

industri, serta kemampuan keuangan Perusahaan, guna menjaga keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan finansial Perusahaan.

Sejalan dengan komitmen untuk memberikan kesejahteraan kepada Pekerja, maka kebijakan Perusahaan terhadap pemberian upah kepada Pekerja Organik golongan terendah diberikan berdasarkan ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Provinsi (UMP), sebagaimana tabel berikut:

and the Company's financial capabilities, to maintain a balance between improving employee welfare and financial sustainability.

In line with its commitment to providing employee welfare, the Company's wage policy for the lowest-level Organic Workers is based on the Regency/City Minimum Wage (UMK) and Provincial Minimum Wage (UMP), as shown in the following table:

Tabel Remunerasi Pekerja Organik Tingkat Terendah dengan UMR Tahun 2025
Remuneration for the Lowest-Level Organic Employees with the 2025 UMR

No.	Lokasi/Wilayah Kerja Work Location/ Area	Provinsi/ Daerah Province/Region	Upah Minimum Provinsi Provincial Minimum Wage	Remunerasi Karyawan Organik Tingkat Terendah Lowest Level Organic Employee Remuneration	Persentase Percentage
1	Kantor Pusat Head Office	DKI Jakarta	Rp5.396.761	Rp12.095.000	224%
2	Regional 1	Sumatera Utara North Sumatra	Rp2.992.559	Rp7.992.000	267%
3	Regional 2	DKI Jakarta	Rp5.396.761	Rp12.095.000	224%
4	Regional 3	Jawa Timur East Java	Rp2.305.985	Rp9.935.000	431%
5	Regional 4	Sulawesi Selatan South Sulawesi	Rp3.657.527	Rp6.130.000	168%

PROGRAM PENSIUN

KEBIJAKAN

Dalam alur sistem pengelolaan Sumber Daya Manusia, terdapat tahapan dimana Pekerja akan memasuki masa pensiun atau pengakhiran hubungan kerja. Pemberian remunerasi, fasilitas dan kesejahteraan Pekerja pascakerja oleh Perusahaan pasca penggabungan masih mengikuti kebijakan di masing-masing Perusahaan sebelum penggabungan sebagaimana yang ditetapkan pada Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor HK.01/1/10/1/HUKU/UTMA/PLND-21 tanggal 01 Oktober 2021 tentang Pemberlakuan Sementara Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), dan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Pada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor HK.01/15/10/1/KIRF/UTMA/PLND-21 tanggal 15 Oktober 2021 tentang Penggunaan Kebijakan Remunerasi, Fasilitas, *Benefit*, dan Kesejahteraan Paska Kerja PT Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV (Persero) oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Selain itu, Perusahaan juga mengatur hubungan kerja antara Pekerja dan Perusahaan secara jelas dan adil melalui Perjanjian Kerja Bersama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Periode Tahun

PROGRAM PENSION

POLICY

In the Human Resource management system flow, there is a stage where Employees will enter retirement or termination of employment. The provision of remuneration, facilities, and post-employment welfare for Employees by the Company after the merger still follows the policies of each Company prior to the merger as stipulated in the Board of Directors Regulation of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Number HK.01/1/10/1/HUKU/UTMA/PLND-21 dated 01 October 2021 concerning Temporary Implementation of Board of Directors Regulations of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), and PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) within PT Pelabuhan Indonesia (Persero), and Board of Directors Regulation of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Number HK.01/15/10/1/KIRF/UTMA/PLND-21 dated 15 October 2021 concerning the Use of Remuneration, Facilities, Benefits, and Post-Employment Welfare Policies of PT Pelabuhan Indonesia I, II, III, and IV (Persero) by PT Pelabuhan Indonesia (Persero). In addition, the Company also regulates the employment relationship between Employees and the Company in a clear and fair manner through the Collective Labor Agreement of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) for the

2023 – 2025 Nomor: KP.08.03/10/11/2/HBUP/UTMA/PLND-23 dan Nomor: 01/XI/SKEP/SPPI-B/2023 tanggal 10 November 2023.

Dalam kebijakan masing-masing Perusahaan sebelum penggabungan, mengatur ketentuan terkait:
1. Ketentuan mengenai pengakhiran hubungan kerja, termasuk antara lain mencapai usia pensiun, meninggal dunia, pelanggaran disiplin, permintaan sendiri, partisipasi dalam program *Golden Handshake*, dan sebab lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;

2. Pemberian program kesejahteraan pascakerja, yang mencakup manfaat jangka pendek dan jangka panjang sebagai bentuk perlindungan dan penghargaan atas masa bakti Pekerja.

STRUKTUR PROGRAM PENSIUN

Program pensiun di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dirancang secara komprehensif untuk memberikan perlindungan berkelanjutan kepada Pekerja, yang meliputi:
1. Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) pada Dana Pensiun Pemberi Kerja yang berlaku bagi Pekerja yang telah terdaftar dalam program PPMP;

2. Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) pada Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK);
3. Program Asuransi Tunjangan Hari Tua;
4. Program Pemberian Pesangon dan manfaat lainnya;
5. Program Jaminan sosial Tenaga Kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan;
6. Program Asuransi Jiwa.

DANA PENSIUN YANG DIKELOLA PERUSAHAAN

Sebagai bagian dari komitmen terhadap keberlanjutan kesejahteraan Pekerja, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) mengelola program pensiun melalui skema Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) yang terstruktur dan berkelanjutan. Pengelolaan dana pensiun ini dirancang untuk memberikan kepastian manfaat, perlindungan finansial, serta mendukung kesejahteraan Pekerja di masa purna bakti.

Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) oleh Dana Pensiun Pelindo

Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) dikelola oleh Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) yang selanjutnya berganti nama menjadi Dana Pensiun Pelindo (Dapen Pelindo). Dana Pensiun yang didirikan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Surat Nomor S-049/MK.13/1989 tanggal 13 Januari 1989.

Besaran iuran dan manfaat pensiun pada Program Pensiun Manfaat Pasti ditetapkan melalui Peraturan Dana Pensiun (PDP) yang disahkan sesuai Keputusan

Period 2023–2025 Number: KP.08.03/10/11/2/HBUP/UTMA/PLND-23 and Number: 01/XI/SKEP/SPPI-B/2023 dated 10 November 2023.

In the policies of each Company prior to the merger, provisions are regulated regarding:
1. Provisions concerning termination of employment, including but not limited to reaching retirement age, death, disciplinary violations, voluntary resignation, participation in the Golden Handshake program, and other reasons in accordance with applicable regulations;
2. Provision of post-employment welfare programs, which include short-term and long-term benefits as a form of protection and appreciation for Employees' years of service.

PENSION PROGRAM STRUCTURE

The pension program at PT Pelabuhan Indonesia (Persero) is comprehensively designed to provide continuous protection for Employees, which includes:
1. Defined Benefit Pension Plan (Program Pensiun Manfaat Pasti/PPMP) under the Employer Pension Fund applicable to Employees who are registered in the PPMP program;
2. Defined Contribution Pension Plan (Program Pensiun Iuran Pasti/PPIP) under the Employer Pension Fund and Financial Institution Pension Fund (DPLK);
3. Old-Age Allowance Insurance Program;
4. Severance Payment Program and other benefits;
5. Social Security Program for Manpower through BPJS Ketenagakerjaan;
6. Life Insurance Program.

PENSION FUNDS MANAGED BY THE COMPANY

As part of its commitment to the sustainability of Employee welfare, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) manages pension programs through a structured and sustainable Employer Pension Fund (DPPK) scheme. The management of this pension fund is designed to provide certainty of benefits, financial protection, and to support Employee welfare in retirement.

Defined Benefit Pension Program (PPMP) by Pelindo Pension Fund

The Defined Benefit Pension Program (PPMP) is managed by the Port and Dredging Company Pension Fund (DP4), which was later renamed Pelindo Pension Fund (Dapen Pelindo). The pension fund was established and has received approval from the Minister of Finance of the Republic of Indonesia through Letter Number S-049/MK.13/1989 dated 13 January 1989.

The amount of contributions and pension benefits under the Defined Benefit Pension Program is determined through the Pension Fund Regulation (PDP), which was

Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan yaitu Nomor: KEP-558/PD.02/2024 tanggal 1 Oktober 2024 tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pelindo, berkedudukan di Jakarta yang ditetapkan dengan Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor : HK.01/22/3/2/KIRF/UTMA/PLND-24 tanggal 22 Maret 2024 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pelindo dan dicatat dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 18 Oktober 2024 No. 84.

Dapen Pelindo merupakan kelanjutan dari program pensiun yang sebelumnya dikelola oleh Yayasan Bersama Dana Pensiun Perusahaan Umum Pelabuhan I, II, III, IV dan Perusahaan Umum Pengerukan (YP4). Program ini berlaku bagi Pekerja yang telah terdaftar dalam program PPMP. Sejalan dengan penggabungan Perusahaan, kedudukan pendiri Dapen Pelindo beralih kepada PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) oleh Dana Pensiun Pelindo Purnakarya

Dana Pensiun Pelindo Purnakarya (DP3) merupakan Dana Pensiun Pemberi Kerja yang didirikan untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) bagi Pekerja Perusahaan dan mitra pendiri, yang Iurannya ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun dan seluruh Iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing Peserta sebagai manfaat pensiun.

Dana pensiun ini bertujuan untuk memberikan kesinambungan penghasilan bagi peserta setelah memasuki masa purna bakti, sehingga kesejahteraan peserta dan pihak yang berhak tetap terjamin.

Dana Pensiun Pelindo Purnakarya didirikan berdasarkan Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Nomor KEP.320.1/KP.0604/P.III-2014 tanggal 4 Juli 2014 dan telah memperoleh pengesahan dari Otoritas Jasa Keuangan. Sejalan dengan proses penggabungan usaha, kedudukan pendiri DP3 beralih kepada PT Pelabuhan Indonesia (Persero), yang kemudian menetapkan kembali Peraturan Dana Pensiun melalui Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor HK.01/17/6/1/KIRF/UTMA/PLND-22 Tanggal 17 Juni 2022 Tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Pelindo Purnakarya yang telah mendapatkan pengesahan sesuai Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-759/NB.11/2022 Tanggal 29 November 2022 Tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pelindo Purnakarya.

Pekerja yang tidak terdaftar dalam PPMP diikutsertakan dalam PPIP melalui Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) maupun Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

approved based on the Decision of a Member of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority (OJK) Number KEP-558/PD.02/2024 dated 1 October 2024 concerning the Approval of the Pension Fund Regulation of Pelindo Pension Fund, domiciled in Jakarta, established through the Board of Directors Regulation of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Number HK.01/22/3/2/KIRF/UTMA/PLND-24 dated 22 March 2024 concerning the Pension Fund Regulation of Pelindo Pension Fund, and recorded in the Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia dated 18 October 2024 No. 84.

Dapen Pelindo is a continuation of the pension program previously managed by the Joint Foundation of Pension Funds of State-Owned Port Companies I, II, III, IV, and State-Owned Dredging Company (YP4). This program applies to Employees registered in the PPMP program. In line with the company merger, the position of founder of Dapen Pelindo has been transferred to PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Defined Contribution Pension Program (PPIP) by Pelindo Purnakarya Pension Fund

Pelindo Purnakarya Pension Fund (DP3) is an Employer Pension Fund established to implement the Defined Contribution Pension Program (PPIP) for Company Employees and founding partners, where contributions are determined in the Pension Fund Regulation and all contributions and their investment returns are recorded in each Participant's account as pension benefits.

This pension fund aims to provide income continuity for participants after retirement, ensuring that the welfare of participants and entitled parties remains guaranteed.

Pelindo Purnakarya Pension Fund was established based on the Decree of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Number KEP.320.1/KP.0604/P.III-2014 dated 4 July 2014 and has obtained approval from the Financial Services Authority. In line with the business merger process, the position of founder of DP3 has been transferred to PT Pelabuhan Indonesia (Persero), which subsequently reissued the Pension Fund Regulation through Board of Directors Regulation of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Number HK.01/17/6/1/KIRF/UTMA/PLND-22 dated 17 June 2022 concerning the Pension Fund Regulation of Pelindo Purnakarya Pension Fund, which has been approved based on the Decree of Board of Commissioners of the Financial Services Authority Number KEP-759/NB.11/2022 dated 29 November 2022 concerning Approval of the Pension Fund Regulation of Pelindo Purnakarya Pension Fund.

Employees who are not registered in the PPMP are enrolled in the PPIP through the Employer Pension Fund (DPPK) and/or Financial Institution Pension Funds (DPLK).

PELAKSANAAN PROGRAM PENSIUN

Program Pensiun Manfaat Pasti yang berjalan saat ini, terdaftar pada Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) dengan jumlah kepesertaan di akhir tahun 2025 yaitu pekerja aktif yang berdasarkan kebijakan perusahaan termasuk dalam daftar kepesertaan sebanyak 1.245 peserta dan pekerja pasif sebanyak 10.366 peserta. Selama pekerja masih berstatus aktif diwajibkan untuk membayarkan iuran yang diperhitungkan dengan nilai prosentase tertentu dari penghasilan dasarnya.

Program Pensiun Iuran Pasti yang berjalan saat ini terdiri dari beberapa program yang didaftarkan pada beberapa Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang iurannya terdapat dibiayai oleh Perusahaan dan dipotong dari penghasilan Pekerja.

IMPLEMENTATION OF PENSION PROGRAM

The ongoing Defined Benefit Pension Program is registered under the Port and Dredging Company Pension Fund (DP4), with total membership at the end of 2025 consisting of active employees who, based on company policy, are included in the membership list totaling 1,245 participants, and inactive employees totaling 10,366 participants. During active employment status, employees are required to contribute a percentage of their base salary.

The ongoing Defined Contribution Pension Program consists of several programs registered in various Financial Institution Pension Funds (DPLK), where contributions are funded by the Company and deducted from Employee income.

Sistem Informasi Sumber Daya Manusia
Human Capital Management Policies And Implementation

Pada tahun 2025 Perseroan telah mengelola sumber daya manusia pada *single system Cloud* ERP SAP RISE modul *Human Capital Management* (SAP HCM) dan mengintegrasikan proses secara *end-to-end*. Solusi SAP HCM digunakan Perseroan untuk mengelola proses-proses inti SDM seperti:

1. Pengelolaan organisasi
2. Pengelolaan data pekerja
3. Pengelolaan data penempatan pekerja
4. Pengelolaan jadwal kerja dan kehadiran
5. Pengelolaan payroll dan benefit
6. Pengelolaan kedisiplinan pekerja
7. Pengelolaan perjalanan dinas

SAP HCM diimplementasikan untuk memastikan pengelolaan data SDM yang efektif, efisien, dan terstandar dalam satu sumber data terintegrasi, dengan tetap memperhatikan kebijakan yang berlaku baik yang telah diharmonisasi maupun kebijakan masing-masing eks Regional. Implementasi SAP HCM juga telah diperluas melalui *roll out* ke 33 entitas (*subholding*, anak, dan cucu perusahaan) di lingkungan Pelindo *Group* sekaligus mendukung standarisasi proses administrasi SDM di seluruh entitas.

Perseroan juga mengintegrasikan SAP HCM dengan sistem lain yang berperan untuk mempermudah antar muka proses-proses tersebut bagi seluruh pekerja yang dapat diakses oleh pekerja dimanapun dan kapanpun, meliputi:

1. **MyPelindo - Pelindo Travel (P-Travel)**
   Portal pengelolaan perjalanan dinas yang meliputi proses administrasi pengajuan, verifikasi biaya serta pertanggungjawaban perjalanan dinas pekerja. P-Travel juga menjadi portal bagi pihak ketiga penyedia jasa pemesanan tiket transportasi dan akomodasi dalam melayani kebutuhan perjalanan dinas perusahaan. P-Travel terintegrasi dengan sistem keuangan yang memungkinkan kontrol terhadap anggaran dan biaya perjalanan dinas.
2. **MyPelindo - Pelindo Clock In/Clock Out (P-CICO)**
   Mobile apps yang memiliki kapabilitas *face recognition* serta *geofencing* untuk memastikan perekaman kehadiran secara lebih fleksibel di area kerja namun tetap memperhatikan kontrol atas kebenaran data dan lokasi penempatan pekerja.
3. **MyPelindo - Pelindo E-Office (PEO)**
   Merupakan sistem administrasi perkantoran berbasis digital dalam pengelolaan korespondensi serta naskah dinas perusahaan baik secara internal maupun eksternal. PEO mendukung *Good Corporate*

In 2025, the Company managed its human capital through a single Cloud ERP system, SAP RISE Human Capital Management (SAP HCM) module, integrating processes end-to-end. The SAP HCM solution is used to manage core HC processes, including:

1. Organizational management
2. Employee data management
3. Employee placement management
4. Work scheduling and attendance management
5. Payroll and benefits management
6. Employee discipline management
7. Business travel management

SAP HCM is implemented to ensure effective, efficient, and standardized human capital data management within a single integrated data source, while taking into account applicable policies, both harmonized policies and those of each former regional entity. The implementation of SAP HCM has also been expanded through rollout to 33 entities (subholdings, subsidiaries, and affiliated companies) within the Pelindo Group, supporting the standardization of HC administrative processes across all entities.

The Company also integrates SAP HCM with other systems to facilitate user-friendly interfaces for these processes, accessible anytime and anywhere by employees, including:

1. **MyPelindo – Pelindo Travel (P-Travel)**
   A business travel management portal covering administrative submission processes, cost verification, and accountability for employee business travel. P-Travel also serves as a portal for third-party service providers offering ticketing and accommodation booking services. It is integrated with the financial system to enable control over travel budgets and expenses.
2. **MyPelindo – Pelindo Clock In/Clock Out (P-CICO)**
   A mobile application equipped with face recognition and geofencing capabilities to ensure flexible attendance recording within the work area while maintaining control over data accuracy and employee location placement.
3. **MyPelindo – Pelindo E-Office (PEO)**
   A digital office administration system for managing correspondence and official documents, both internally and externally. PEO supports Good Corporate Governance (GCG) by enabling traceable and efficient

Governance (GCG) dengan memungkinkan koordinasi kedinasan yang *traceable*, efisien, pengarsipan naskah dinas secara lebih terstruktur, mengurangi penggunaan kertas (*paperless*) serta menjamin keamanan dan akuntabilitas dokumen Perusahaan

4. **MyPelindo - Pelindo Eats (P-Eats)**
   Merupakan sistem pengelolaan fasilitas makan siang pekerja dalam bentuk *e-voucher* yang dapat digunakan oleh pekerja dengan berbelanja di *tenant-tenant* yang F&B yang bekerja sama dengan PT Menara Maritim Indonesia. Pemberian *e-voucher* didasarkan pada presensi 2 (dua) bulan kehadiran Pekerja.
5. **MyPelindo – Pelindo Meet (P-Meet)**
   Merupakan sistem pengelolaan ruang rapat di Pelindo Tower yang memungkinkan pekerja mencari, memilih, dan memesan ruang rapat dengan mudah. Dilengkapi fitur pencarian berdasarkan kapasitas, fasilitas, dan jadwal ketersediaan, sistem ini meningkatkan koordinasi dan efektivitas rapat.
6. **MyPelindo – Pelindo Wellness (P-Well)**
   Merupakan aplikasi untuk pencatatan dan pengelolaan data hasil *Medical Check-Up* (MCU) serta berbagai informasi kesehatan lainnya. Aplikasi ini mencakup hasil tes kesehatan, rekomendasi dokter, termasuk kesimpulan dan saran medis, yang disampaikan secara digital dalam satu platform terpusat. Dengan P-WELL, pekerja dapat mengakses riwayat kesehatan mereka dengan mudah, memantau kondisi kesehatan secara berkala, dan mendapatkan rekomendasi medis yang lebih terstruktur.
7. **MyPelindo – Pelindo Gym (P-Gym)**
   Merupakan sistem pengelolaan fasilitas *gym* di Pelindo Tower yang memungkinkan pekerja untuk mendaftar, memesan jadwal latihan, serta mengakses informasi mengenai fasilitas dan *Personal Trainer* yang tersedia sehingga mendukung gaya hidup sehat dan aktif bagi pekerja.
8. **HR Webpooling**
   Merupakan aplikasi pelaporan SDM terpusat yang mencatat data tenaga kerja, termasuk pekerja organik Pelindo, organik anak perusahaan, PKWT, TAD, dan TKHL. Aplikasi ini memungkinkan pemantauan jumlah pekerja, baik secara konsolidasi maupun *outstanding*, secara *real-time* dan dilaporkan setiap bulan. Dengan *Webpooling*, manajemen dapat mengakses data akurat untuk mendukung pengambilan keputusan strategis dalam pengelolaan SDM.
9. **Pelindo Fit (P-Fit)**
   Merupakan aplikasi pencatatan aktivitas olahraga yang dapat dilakukan secara mandiri dan sesuai dengan minat Pekerja yang terintegrasi dengan aplikasi Strava. Program P-FIT bertujuan untuk mendorong dan meningkatkan pola hidup sehat melalui berolahraga serta menciptakan lingkungan kerja yang produktif, sehat, aman, nyaman, dan bahagia bagi seluruh Insan Grup Pelindo untuk mewujudkan *Employee Well-Being Policy* (EWP) di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

coordination, structured document archiving, reduced paper usage (paperless), and ensuring document security and accountability.

4. **MyPelindo – Pelindo Eats (P-Eats)**
   A system for managing employee lunch facilities in the form of e-vouchers that can be used at food and beverage tenants partnered with PT Menara Maritim Indonesia. The e-vouchers are granted based on two months of employee attendance records.
5. **MyPelindo – Pelindo Meet (P-Meet)**
   A meeting room management system at Pelindo Tower that allows employees to search, select, and book meeting rooms easily. Equipped with features such as capacity, facilities, and availability scheduling, it enhances coordination and meeting effectiveness.
6. **MyPelindo – Pelindo Wellness (P-Well)**
   An application for recording and managing Medical Check-Up (MCU) results and other health-related information. It includes test results, doctor recommendations, conclusions, and medical advice, all delivered digitally in a centralized platform. Employees can easily access their health history, monitor their condition, and receive structured medical recommendations.
7. **MyPelindo – Pelindo Gym (P-Gym)**
   A system for managing gym facilities at Pelindo Tower, allowing employees to register, book workout sessions, and access information about available facilities and personal trainers, supporting a healthy and active lifestyle.
8. **HC Webpooling**
   A centralized HC reporting application that records workforce data, including Pelindo employees, subsidiary employees, fixed-term contract workers (PKWT), outsourced workers (TAD), and non-permanent workers (TKHL). It enables real-time monitoring of workforce numbers, both consolidated and outstanding, with monthly reporting.
9. **Pelindo Fit (P-Fit)**
   An application for recording sports and physical activities, integrated with the Strava app. The P-FIT program aims to promote a healthy lifestyle and create a productive, healthy, safe, comfortable, and happy work environment for all Pelindo Group employees, in line with the Employee Well-Being Policy (EWP).

10. **Pelindo Employee Self Service (P-ESS)**
    Portal *employee self-service* bagi pekerja untuk secara mandiri melakukan pengelolaan data personal pekerja, jadwal kerja, kehadiran, cuti, lembur, *benefit*, *payslip*. P-ESS memungkinkan seluruh administrasi pekerja dilakukan dengan lebih mudah dengan tetap menerapkan kontrol melalui *workflow approval* untuk setiap proses sesuai dengan ketentuan perusahaan. Dengan adanya P-ESS, pekerja lebih memiliki tanggung jawab/*ownership* terhadap data masing-masing, sehingga fungsi SDM tidak hanya administratif, melainkan melakukan kontrol dan analisis.
11. **Portaverse**
    Portaverse merupakan aplikasi Pengelolaan SDM yang terintegrasi dengan konsep sosial media yang menggabungkan 3 (tiga) modul sistem, di antaranya *Knowledge Management System* (KMS), *Learning Management System* (LMS), dan *Talent & Performance System* (T/PMS). *Portaverse Knowledge* mendukung pencapaian tujuan perusahaan melalui sistem pengelolaan dan pemanfaatan pengetahuan yang lengkap dan terintegrasi. *Portaverse Learning* mengoptimalkan sistem pembelajaran untuk meningkatkan kapabilitas pekerja sesuai perkembangan Bisnis perusahaan. *Portaverse Talent & Performance* meningkatkan proses *talent life-cycle* perusahaan yang meliputi kegiaran perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan pelaporan *talent* secara *online* dan terintegrasi.
12. **HC Dashboard**
    Sistem yang memungkinkan manajemen mendapatkan *overview* data secara interaktif dan visual terkait kondisi sumber daya manusia terkini di perusahan. HC *Dashboard* diharapkan dapat menjadi *decision support system* bagi manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih tepat terkait dengan sumber daya manusia di Perseroan.
13. **Pelindo Electronic Record Center (P-ERCENT)**
    Merupakan pengelolaan arsip elektronik secara komprehensip dan terpadu dikelola melalui Pelindo *Electronic Record Center* (P-ERCENT) sebagai wadah kelola yang dibutuhkan untuk menjamin rekaman informasi yang terkandung dalam lembaran arsip, mempermudah akses terhadap arsip elektronik, mempercepat penyajian informasi yang terekam dalam arsip elektronik, menjamin keamanan akses arsip elektronik dari pihak yang tidak berkepentingan, dan sebagai fasilitas *backup* arsip-arsip vital. Pelindo *Electronic Record Center* (P-ERCENT) juga dibutuhkan untuk mengakomodir pengelolaan arsip mulai dari dokumen diciptakan oleh perangkat digital, dalam lingkup digital dan format digital, mengandalkan perangkat digital seperti komputer untuik membaca dan pemrosesan, dan dapat didistribusikan melalui jaringan komunikasi sampai dengan dilakukan penyusutan sesuai dengan kaidah kearsipan di PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

10. **Pelindo Employee Self Service (P-ESS)**
    An employee self-service portal that allows employees to independently manage personal data, work schedules, attendance, leave, overtime, benefits, and payslips. P-ESS simplifies administrative processes while maintaining control through approval workflows. It also fosters greater employee ownership of personal data, shifting HC's role toward control and analysis rather than purely administrative functions.
11. **Portaverse**
    Portaverse is an integrated human capital management application with a social media concept, combining three system modules: Knowledge Management System (KMS), Learning Management System (LMS), and Talent & Performance Management System (T/PMS). Portaverse Knowledge supports organizational goals through comprehensive knowledge management. Portaverse Learning optimizes learning systems to enhance employee capabilities in line with business developments. Portaverse Talent & Performance improves the talent lifecycle, including planning, execution, measurement, and reporting in an integrated online system.
12. **HC Dashboard**
    A system that provides management with an interactive and visual overview of the Company's current human capital conditions. The HC Dashboard serves as a decision support system to enable more accurate and informed HC-related decision-making.
13. **Pelindo Electronic Record Center (P-ERCENT)**
    This involves the comprehensive and integrated management of electronic records through the Pelindo Electronic Record Centre (P-ERCENT) as the management platform required to ensure the preservation of information contained within archive records, facilitate access to electronic records, accelerate the retrieval of information recorded in electronic records, ensure secure access to electronic records from unauthorised parties, and serve as a backup facility for vital records. Pelindo Electronic Record Centre (P-ERCENT) is also required to accommodate the management of records from the moment documents are created by digital devices, within a digital scope and in digital formats, relying on digital devices such as computers for reading and processing, and capable of being distributed via communication networks until they are disposed of in accordance with archival principles at PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

14. **Pelindo Inventory Management System (P-Invent)**
Merupakan aplikasi yang dikembangkan untuk mendukung proses pencatatan, pengelolaan, serta pemantauan barang inventaris perlengkapan kantor secara digital guna meningkatkan efisiensi operasional, akurasi, dan transparansi dalam pengelolaan aset perusahaan. Aplikasi ini dirancang untuk menyederhanakan proses pencatatan, pelacakan, dan pengelolaan inventaris, memastikan keakuratan data, mengurangi risiko kesalahan input, serta menyediakan informasi yang mutakhir mengenai status dan kondisi aset inventaris perusahaan.

Implementasi ERP beserta *surrounding system* terkait Pengelolaan SDM disertai dengan pelaksanaan *change management*, baik pada proses yang berjalan secara *end-to-end* maupun kepada setiap *stakeholder* terkait, mulai dari manajemen, pekerja hingga pihak-pihak eksternal. Perseroan selanjutnya akan melaksanakan standarisasi dan tata kelola serta mengembangkan kapabilitas integrase, sistem antar entitas group terkait data-data SDM untuk mengoptimalkan Pengelolaan administrasi serta talenta yang dimiliki.

14. **Pelindo Inventory Management System (P-Invent)**
An application developed to support the recording, management, and monitoring of office inventory digitally, improving operational efficiency, accuracy, and transparency in asset management. It simplifies tracking and management processes, ensures data accuracy, reduces input errors, and provides up-to-date information on asset status and condition.

The implementation of ERP and its supporting systems for human capital management is accompanied by change management initiatives, covering end-to-end processes and all stakeholders, including management, employees, and external parties. The Company will continue to standardize governance and enhance integration capabilities across group entities for human capital data to optimize administrative management and talent development.

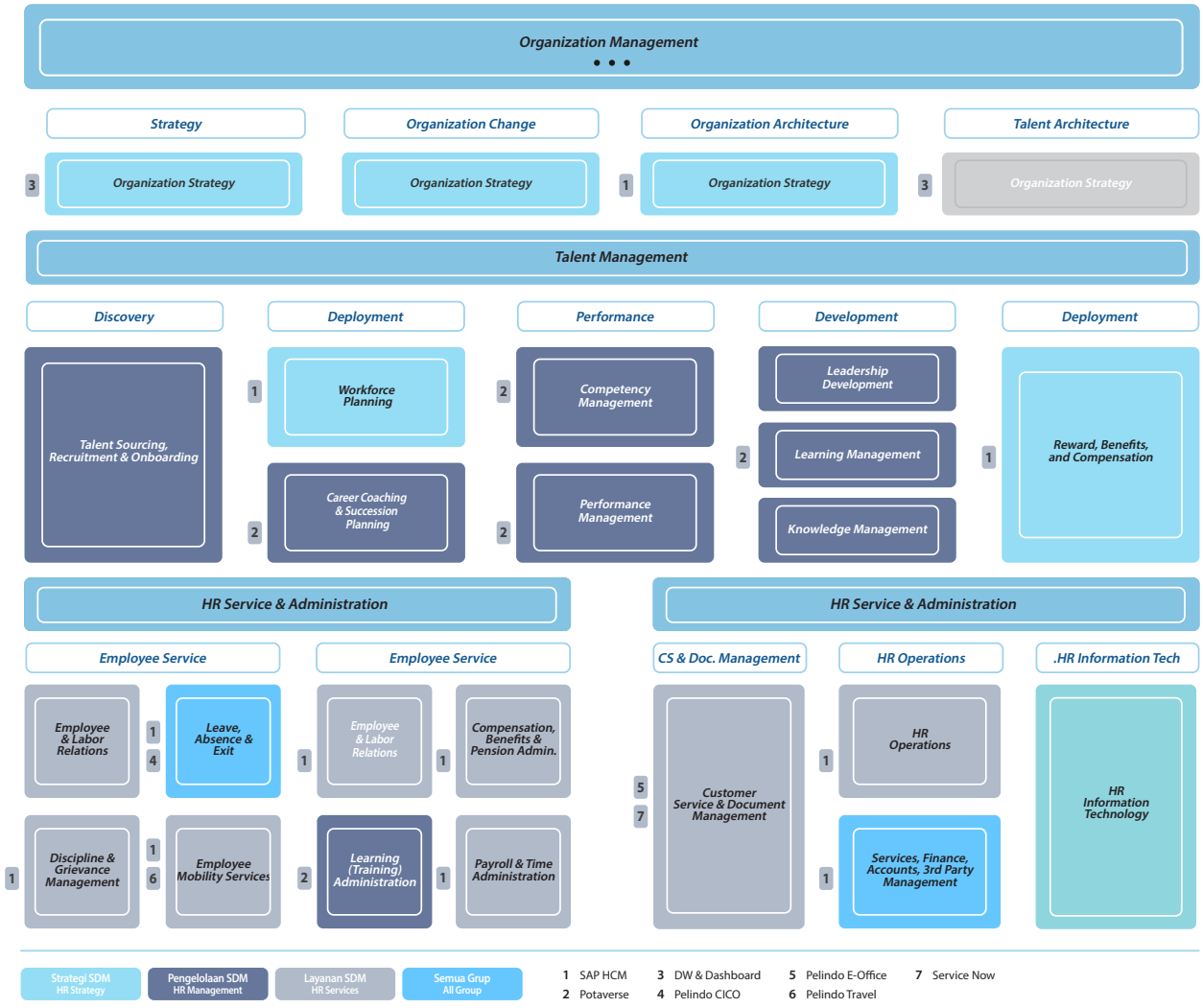

Internalisasi Budaya
Internalization of Culture

Sebagai bentuk keberlanjutan dan internalisasi budaya Perusahaan, Pelindo melakukan berbagai inisiatif sebagai berikut:

TAHAP AWAL

Pada tahap ini, fokus utama kegiatan pengelolaan budaya adalah membangun kesadaran dan pemahaman pekerja akan budaya perusahaan. Tahap ini dimulai dengan komunikasi yang bertujuan untuk memperkenalkan Nilai-Nilai Utama kepada seluruh pekerja, di antaranya melalui kegiatan berikut:

1. Komunikasi oleh Para Pimpinan dilakukan melalui:
   a. Penyusunan peraturan Direksi terkait:
      - AKHLAK *Culture Journey*
      - *Respectful Workplace Policy*
   b. Pelaksanaan Pelindo Forum sebagai sarana komunikasi Top Manajemen Pelindo untuk menyampaikan visi-misi, tujuan dan arah perusahaan. Pada tahun 2025 dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu bulan Januari dan September 2025.
2. Pengelolaan *Change Catalyst Team:*
   a. Tahap Pengembangan
      - *Refreshment* dan *Action Plan Workshop for Change Agent*
        Workshop bertujuan untuk *refreshment* terkait tugas dan tanggung jawab *Change Agent,* sosialisasi *playbook,* serta pendampingan penyusunan *action plan.* Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 7 (tujuh) *batch* pada bulan Februari hingga Maret 2025 di Bogor, Surabaya, Medan dan Makassar;
      - *Refreshment Workshop for Change Champion & Change Leader*
        Workshop "Cultural Change in Action" bertujuan untuk memperkuat kembali peran strategis *Change Leader* dan *Change Champion* dalam mendukung keberhasilan implementasi budaya perusahaan secara terstruktur dan berkelanjutan. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 4 (empat) *batch* pada bulan Juni 2025 secara *online.*
   b. Tahap Pembinaan & *Monitoring*
      Pengelola Budaya melakukan monitoring terhadap *Change Catalyst Team* (CCT) melalui sistem *Portaverse* setiap triwulan.
   c. Tahap evaluasi
      Evaluasi pengelolaan CCT dilaksanakan melalui kegiatan *Culture Forum* yang dihadiri oleh Pengelola Budaya Kantor Pusat, Regional, dan Subholding. Pada tahap ini dilakukan peninjauan terhadap efektivitas pelaksanaan *action plan*,

As a form of sustainability and internalization of corporate culture, Pelindo carries out various initiatives as follows:

Initial Stage

At this stage, the main focus of culture management activities is to build awareness and understanding among employees regarding the company culture. This stage begins with communication aimed at introducing the Core Values to all employees, including through the following activities:

1. Communication by Leaders conducted through:
   a. Formulation of Board of Directors regulations related to:
      - AKHLAK Culture Journey
      - Respectful Workplace Policy
   b. Implementation of Pelindo Forum as a communication medium for Pelindo Top Management to convey the company's vision, mission, objectives, and direction. In 2025, it was held twice, namely in January and September 2025.
2. Management of Change Catalyst Team:
   a. Development Stage
      - Refreshment and Action Plan Workshop for Change Agent
        The workshop aims to refresh understanding of the duties and responsibilities of Change Agents, socialize the playbook, and provide assistance in preparing action plans. This activity was conducted in 7 batches from February to March 2025 in Bogor, Surabaya, Medan, and Makassar;
      - Refreshment Workshop for Change Champion & Change Leader
        The "Cultural Change in Action" workshop aims to strengthen the strategic role of Change Leaders and Change Champions in supporting the successful implementation of corporate culture in a structured and sustainable manner. This activity was conducted in 4 online batches in June 2025.
   b. Coaching & Monitoring Stage
      The Culture Management team conducts monitoring of the Change Catalyst Team (CCT) through the Portaverse system every quarter.
   c. Evaluation Stage
      Evaluation of CCT management is carried out through Culture Forum activities attended by Culture Management from Headquarters, Regional, and Subholding levels. At this stage, reviews are conducted on the effectiveness of action

capaian program, tantangan implementasi, serta identifikasi area perbaikan untuk periode berikutnya. Sebagai bentuk apresiasi atas peran aktif dalam menggerakkan budaya perusahaan, sebanyak 216 *Change Agent* dari total 972 *Change Agent* memperoleh *additional point* pada Penilaian Kinerja Individu.

3. Penuansaan budaya Perusahaan pada tahun 2025 dilakukan melalui berbagai artefak seperti *virtual background*, kaos, botol minum dan lain lain yang bertemakan nilai perusahaan.

TAHAP INTERVENSI

Tahap ini merupakan perubahan secara terencana agar pekerja berperilaku selaras dengan Nilai-Nilai Utama melalui beberapa kegiatan berikut:

1. Komitmen Pimpinan *(Leadership)*
   Komitmen pimpinan dicerminkan melalui beberapa kegiatan yang melibatkan Direksi dan manajemen dari berbagai level yaitu:
   a. BERLABUH (Bincang Bersama Pelabuhan Indonesia) Edisi Direksi merupakan salah satu program internalisasi budaya perusahaan yang menghubungkan individu dan memfasilitasi pertukaran pengetahuan, pengalaman dan wawasan di lingkungan Pelindo. Pada tahun 2025, BERLABUH edisi Direktur bekerja sama dengan Program *Ask the* CEO terlaksana sebanyak 1 (satu) kali.
   b. *Leadership Forum*, sebuah inisiatif yang bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam mengenai kepemimpinan melalui format *podcast* dengan melibatkan pembicara internal maupun eksternal. Pada tahun 2025, *Leadership Forum* terlaksana sebanyak 6 (enam) kali, diikuti oleh pekerja struktural di lingkungan Pelindo *Group*.
   c. Pelindo *E-Talks* (Pelindo *Empower Talk)*, merupakan sarana komunikasi Direksi *Holding* kepada pekerja untuk menyampaikan nilai-nilai, budaya, strategi dan tujuan perusahaan. Kegiatan ini telah dilaksanakan pada bulan Agustus 2025 di PMLI, Ciawi.
   d. *Coffee Connect* merupakan program internalisasi budaya perusahaan *Break The Silo* (BTS) yang mengusung konsep untuk saling mengenal dan berdiskusi secara *informal* sambil ngopi bareng untuk meningkatkan koordinasi, komunikasi dan kolaborasi. Program ini diikuti oleh *Group Head/ Department Head*/Direksi Anak Perusahaan dengan Dewan Direksi *Holding*. Pada tahun 2025, *Coffee Connect* telah dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali.
2. Sistem
   Dalam rangka implementasi budaya, Pelindo membangun dan mengembangkan sistem pengelolaan SDM dan inovasi terintegrasi bernama Portaverse yang terdiri dari:

plan implementation, program achievements, implementation challenges, and identification of areas for improvement for the next period. As a form of appreciation for active roles in driving corporate culture, 216 Change Agents out of a total of 972 Change Agents received additional points in the Individual Performance Assessment.

3. Cultural conditioning of the Company in 2025 is carried out through various artifacts such as virtual backgrounds, t-shirts, water bottles, and others themed around company values.

INTERVENTION STAGE

This stage represents a planned transformation so that employees behave in alignment with the Core Values through the following activities:

1. Leadership Commitment
   Leadership commitment is reflected in several activities involving the Board of Directors and management at various levels, namely:
   a. BERLABUH (Bincang Bersama Pelabuhan Indonesia) Director Edition is one of the corporate culture internalization programs that connects individuals and facilitates the exchange of knowledge, experience, and insights within Pelindo. In 2025, the Director edition of BERLABUH in collaboration with the Ask the CEO program was held once.
   b. Leadership Forum, an initiative aimed at providing in-depth leadership insights through podcast format involving internal and external speakers. In 2025, it was held 6 times, attended by structural employees within the Pelindo Group.
   c. Pelindo E-Talks (Pelindo Empower Talk), a communication medium from Holding Directors to employees to convey values, culture, strategy, and company objectives. This activity was conducted in August 2025 at PMLI, Ciawi.
   d. Coffee Connect is a corporate culture internalization program Break The Silo (BTS) with a concept of informal discussion while having coffee to enhance coordination, communication, and collaboration. This program involves Group Heads/Department Heads/Directors of Subsidiaries with the Board of Directors of the Holding. In 2025, it was held 5 times.
2. System
   In implementing culture, Pelindo develops an integrated HR management and innovation system called Portaverse, consisting of:

a. *Portaverse Knowledge*
Mendukung pencapaian tujuan perusahaan melalui sistem pengelolaan dan pemanfaatan pengetahuan yang lengkap dan terintegrasi.
b. *Portaverse Learning*
Mengoptimalkan sistem pembelajaran *online* untuk meningkatkan kapabilitas karyawan sesuai perkembangan bisnis Perusahaan.

c. *Portaverse Talent & Management*
Meningkatkan proses *talent life-cycle* perusahaan yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan pelaporan *talent* secara *online* dan terintegrasi.
d. *Portaverse Innovation*
Mendukung pencapaian tujuan perusahaan melalui sistem pengelolaan inovasi.
e. *Portaverse Culture*
Mendukung pencapaian tujuan perusahaan melalui sistem manajemen pengelolaan budaya yang terintegrasi.

3. Simbol dan Atribut
Simbol dicerminkan melalui terciptanya atribut dan lingkungan yang mendukung program implementasi budaya perusahaan. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung hal ini tercermin pada beberapa kegiatan, diantaranya:
a. *Swap My Role* (SMR) memberikan kesempatan bagi para pekerja organik level staf untuk belajar dan bertumbuh melalui *exposure* dan pengalaman bekerja di departemen lain. Tahun 2025, pelaksanaan SMR diikuti oleh 11 orang peserta dengan mengusung konsep baru, yaitu belajar di departemen lain sesuai dengan *project* yang tersedia dengan *deliverables* yang telah ditentukan.
b. BERLABUH merupakan salah satu program internalisasi budaya perusahaan yang menghubungkan individu dan memfasilitasi pertukaran pengetahuan, pengalaman dan wawasan di lingkungan Pelindo. Kegiatan *sharing session* ini reguler dilaksanakan setiap 2 (dua) minggu sekali, berlangsung sejak awal *merger* yaitu pada tahun 2021. BERLABUH mengusung konsep *live podcast* dengan mengundang narasumber internal maupun eksternal untuk membahas tema terkini yang disinergikan dengan nilai perusahaan. Pada tahun 2025, BERLABUH terlaksana sebanyak 14 (empat belas) kali, diikuti oleh pekerja di lingkungan Pelindo *Group*.
c. BUMN Muda Pelindo, wadah organisasi ini ditujukan bagi pekerja milenial untuk bekerja, bersosialisasi, berkarya dan menuangkan ide dan kreativitas dengan tetap mendukung kinerja bagi para anggotanya. Pada tahun 2025 terlaksana 9 (sembilan) program kerja meliputi Donasi Buku, Jejak Masa Depan Series 2, BMP Mengajar Lamun, Lomba & Aksi Semarak Ramadhan, COP Inovasi,

a. Portaverse Knowledge
Supporting company objectives through a comprehensive and integrated knowledge management system.

b. Portaverse Learning
Optimizing online learning systems to enhance employee capabilities in line with business development.
c. Portaverse Talent & Management
Improving the company's talent life-cycle process including planning, implementation, measurement, and reporting of talent in an online and integrated manner.
d. Portaverse Innovation
Supporting company objectives through an innovation management system.
e. Portaverse Culture
Supporting company objectives through an integrated culture management system.

3. Symbols and Attributes
Symbols are reflected through the creation of attributes and environments that support the implementation of corporate culture programs. Activities supporting this include:

a. Swap My Role (SMR) provides opportunities for staff-level employees to learn and grow through exposure and experience working in other departments. In 2025, SMR involved 11 participants with a new concept of learning in other departments according to available projects with defined deliverables.

b. BERLABUH is a corporate culture internalization program that connects individuals and facilitates exchange of knowledge, experience, and insights within Pelindo. This sharing session is regularly conducted every two weeks since the merger in 2021. BERLABUH adopts a live podcast concept with internal and external speakers discussing current themes aligned with company values. In 2025, it was held 14 times, attended by employees in the Pelindo Group.

c. BUMN Muda Pelindo is an organization for millennial employees to work, socialize, create, and express ideas and creativity while supporting performance. In 2025, it carried out 9 programs including Book Donation, Jejak Masa Depan Series 2, BMP Teaching Lamun, Competition & Ramadan Semarak Activities, COP Innovation, National Book Day Celebration, BERLABUH Road to RBB Batch

Peringatan Hari Buku Nasional, BERLABUH *Road to* RBB *Batch* 8, Sekolah RBB *Batch* 8, Pojok Lentera RPTRA Jakarta & Program Tanggap Bencana.

d. Mutiara Pelindo, organisasi ini lahir dengan semangat pemberdayaan pekerja perempuan dengan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung perempuan untuk dapat berkarya. Pada tahun 2025 terlaksana 9 (sembilan) program kerja meliputi *Respectful Workplace Program*, *Podcast Pra Menopause*, Penyaluran Beasiswa, Lelang Amal, Mutiara Lestarikan Bumi, Gerakan Merapikan Lemari (Gemari), Survei Mutiara, Peringatan Hari Ibu, Peringatan Hari Kartini.

TAHAP PENERIMAAN DAN PERUBAHAN PERILAKU

Pada tahap ini, dilakukan pengukuran perilaku pekerja di lingkungan Pelindo tahun 2025 yang diikuti oleh 98 % pekerja organik Pelindo. Hasil pengukuran dengan skor 5,67 (skala 6) menunjukkan bahwa seluruh pekerja telah menerapkan nilai perusahaan dalam kegiatan sehari-hari.

Selain pengukuran perilaku, telah dilakukan pengukuran *Organizational Culture Health Index* (OCHI) dengan metodologi *top of mind*, yang diikuti oleh 99 % pekerja organik Pelindo. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa budaya kerja Pelindo saat ini menunjukkan keselarasan dengan tujuan penggabungan perusahaan. Namun diperlukan penguatan lebih lanjut untuk mendukung transformasi perusahaan secara menyeluruh, termasuk penguatan budaya berbasis kinerja, pemaknaan tujuan bersama dan internalisasi budaya.

8, RBB School Batch 8, Pojok Lentera RPTRA Jakarta & Disaster Response Program.

d. d. Mutiara Pelindo is an organization established with the spirit of empowering female employees by creating a supportive workplace environment. In 2025, it carried out 9 programs including Respectful Workplace Program, Podcast Pre-Menopause, Scholarship Distribution, Charity Auction, Mutiara Lestarikan Bumi, Wardrobe Tidying Movement (Gemari), Mutiara Survey, Kartini Day Commemoration, and Mother's Day Commemoration.

ACCEPTANCE STAGE AND BEHAVIORAL CHANGE

At this stage, employee behavior measurement within Pelindo in 2025 was conducted, involving 98% of organic employees. The result with a score of 5.67 (out of 6) shows that all employees have implemented company values in their daily activities.

In addition to behavioral measurement, an Organizational Culture Health Index (OCHI) assessment was also conducted using a top-of-mind methodology, involving 99% of organic employees. The results indicate that Pelindo's current work culture is aligned with the objectives of the company merger. However, further strengthening is required to support comprehensive corporate transformation, including strengthening performance-based culture, shared purpose understanding, and culture internalization.

Keterbukaan Informasi Kepada Pekerja
Disclosure of information to employees

Sebagai bagian dari komitmen terhadap tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), Perseroan senantiasa menjunjung tinggi prinsip transparansi dalam penyampaian informasi kepada seluruh pekerja. Keterbukaan informasi dipandang sebagai fondasi penting dalam membangun kepercayaan, memperkuat engagement, serta memastikan keselarasan arah strategis perusahaan di seluruh lini organisasi.

As part of its commitment to Good Corporate Governance, the Company consistently upholds the principle of transparency in delivering information to all employees. Information disclosure is viewed as an important foundation in building trust, strengthening engagement, and ensuring alignment of the company's strategic direction across all organizational levels.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Perseroan menyediakan berbagai kanal komunikasi yang transparan, interaktif, dan mudah diakses oleh pekerja. Kanal tersebut mencakup forum interaktif, platform internal perusahaan, hingga media digital yang dirancang untuk memastikan informasi strategis, kebijakan, arahan strategis, serta informasi perkembangan perusahaan dapat tersampaikan secara komprehensif.

To realize this, the Company provides various communication channels that are transparent, interactive, and easily accessible to employees. These channels include interactive forums, internal company platforms, and digital media designed to ensure that strategic information, policies, strategic directives, and company developments are delivered comprehensively.

Dalam bentuk forum dan acara internal, Perseroan secara rutin menyelenggarakan Pelindo Forum, *eTalks*, *Leadership Talk*, Berlabuh, *Coffee Connect, Community of Practice* (CoP), rangkaian Hari Pelindo, Refleksi Akhir Tahun, serta *Ask the CEO*. Forum-forum ini tidak hanya menjadi sarana penyampaian informasi manajerial dan strategis, tetapi juga membuka ruang dialog dua arah antara manajemen dan pekerja, sehingga aspirasi, masukan, serta pertanyaan dapat disampaikan secara terbuka.

In the form of internal forums and events, the Company regularly holds Pelindo Forum, eTalks, Leadership Talk, Berlabuh, Coffee Connect, Community of Practice (CoP), Pelindo Day series, Year-End Reflection, and Ask the CEO. These forums not only serve as a medium for delivering managerial and strategic information but also provide a two-way dialogue space between management and employees, allowing aspirations, inputs, and questions to be openly conveyed.

Selain itu, Perseroan menghadirkan *Portaverse*, yaitu *platform* internal perusahaan di mana salah satu fungsinya adalah sebagai media sosial khusus pekerja. Melalui *Portaverse*, pekerja dapat mengakses informasi terkini, berbagi pengetahuan, berkolaborasi lintas unit, serta memperkuat budaya kerja yang kolaboratif dan adaptif.

In addition, the Company provides Portaverse, an internal company platform where one of its functions is as a dedicated employee social media platform. Through Portaverse, employees can access the latest information, share knowledge, collaborate across units, and strengthen a collaborative and adaptive work culture.

Pada ranah media digital, Perseroan menerbitkan majalah digital perusahaan Pelindo Corner yang memuat informasi strategis, capaian kinerja, program prioritas, serta arahan management. Informasi internal juga disampaikan melalui kanal Instagram Pelindo Change Hub, yang menjadi media komunikasi digital untuk memperluas pemahaman pekerja terhadap program prioritas Perusahaan.

In the digital media domain, the Company publishes a digital company magazine, Pelindo Corner, which contains strategic information, performance achievements, priority programs, and management directives. Internal information is also delivered through the Instagram channel Pelindo Change Hub, which serves as a digital communication medium to broaden employees' understanding of the Company's priority programs.

Melalui berbagai kanal tersebut, Perseroan memastikan bahwa setiap pekerja memiliki akses terhadap informasi yang relevan, akurat, dan transparan, sekaligus mendorong terciptanya budaya komunikasi yang terbuka, kolaboratif, dan berorientasi pada keberlanjutan kinerja perusahaan.

Through these various channels, the Company ensures that every employee has access to relevant, accurate, and transparent information, while also encouraging the creation of a communication culture that is open, collaborative, and oriented toward sustainable company performance.

Struktur Pengelola Sumber Daya Manusia
Human Capital Management Structure

Berikut adalah Struktur pengelola *Human Capital* di Pelindo:

The following is the Human Capital management structure at Pelindo:

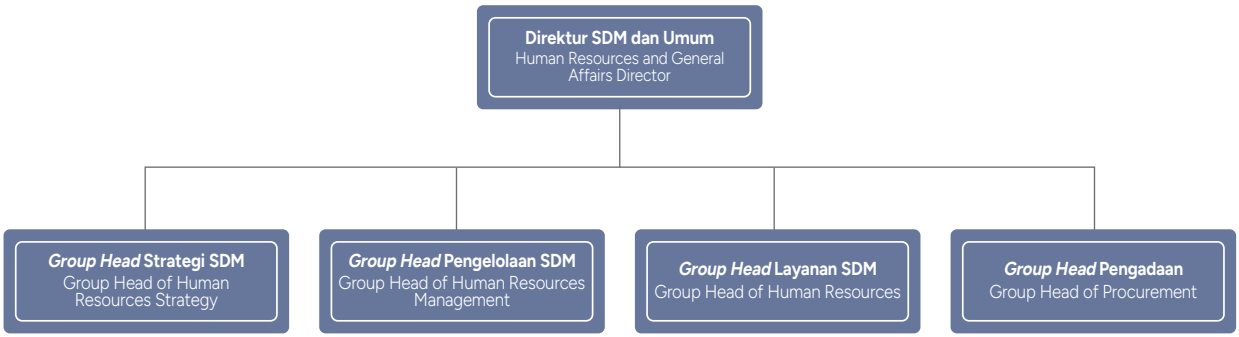

Jabatan Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum berfungsi dalam mengarahkan, menetapkan, menyetujui strategi dan kebijakan-kebijakan yang meliputi strategi SDM, pengelolaan SDM, layanan SDM dan pengadaan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perusahaan.

The position of Director of Human Capital and General Affairs functions to direct, determine, approve strategies and policies that include HC strategies, HC management, HC services and procurement to support the achievement of the Company's vision and mission.

Rencana Kerja Sumber Daya Manusia 2026
Human Capital Work Plan 2026

Rencana kerja SDM untuk tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Group Strategi SDM
2.

The HC work plan for 2026 is as follows:

1. **HC Strategy Group**

No.	Rencana Kerja Work Plan	Deskripsi Description
1.	Implementasi Standarisasi Remunerasi di 4 Entitas Implementation of Remuneration Standardization in 4 Entities	Merupakan tindak lanjut dari implementasi standarisasi remunerasi pada Pelindo *Group* yang akan mulai diterapkan pada entitas yang tidak memiliki PKWTT sendiri dan PKB. This is a follow-up to the implementation of remuneration standardization within Pelindo Group, which will begin to be applied to entities that do not have their own PKWTT and CLA.
2.	Implementasi *Corporate Parenting* di Bidang SDM di Anak Perusahaan Pelindo Implementation of Corporate Parenting in HC at Pelindo Subsidiaries	Merupakan monitoring implementasi *Corporate Parenting* di bidang SDM pada 4 *Sub Holding* dan Anak Perusahaan Non Cluster. This is a monitoring of the implementation of Corporate Parenting in the HC sector in four Sub-Holdings and Non-Cluster Subsidiaries.

No.	Rencana Kerja Work Plan	Deskripsi Description
3.	Pemetaan dan Penyiapan Alih Profesi SDM Pasca Implementasi Pemurnian Bisnis Mapping and Preparation for HC Professional Transfers Post-Business Refinement	Merupakan tindak lanjut dari aksi korporasi terhadap penataan SDM pada Pelindo *Group*. This is a follow-up to corporate actions related to HC management within Pelindo Group.
4.	Penyusunan *Dashboard* Analisis Perencanaan SDM dan Beban Kerja Preparation of an HC Planning and Workload Analysis Dashboard	Merupakan tindak lanjut dari aksi korporasi terhadap penataan SDM pada Pelindo *Group*. This is a follow-up to corporate actions related to HC management within Pelindo Group.
5.	Keselarasan Implementasi Sistem SDM Terintegrasi di Lingkungan Pelindo *Group* Alignment of Integrated HC System Implementation within Pelindo Group	Merupakan evaluasi kesiapan (*readiness*) organisasi dalam mengadopsi integrasi sistem SDM dan teknologi baru, serta memastikan setiap entitas Pelindo *Group* melaksanakan implementasi sesuai standar dan roadmap yang telah ditetapkan. This is an evaluation of the organization's readiness to adopt the integration of HR systems and new technologies, and to ensure that each Pelindo Group entity implements the implementation according to established standards and roadmaps.
6.	Integrasi Sistem Manajemen SDM Integration of HC Management System	Merupakan monitoring seluruh proses bisnis bidang SDM agar tetap align dan tidak saling tumpang tindih satu dengan yang lain. This is a monitoring of all HC business processes to ensure alignment and avoid overlap.
7.	Pelaksanaan HC Forum (*Human Capital Forum*) Implementation of Human Capital Forum (HC Forum)	Merupakan program optimalisasi koordinasi dan sinergi Direktorat SDM untuk mendukung kinerja korporasi. This is a program to optimize coordination and synergy within the HC Directorate to support corporate performance.
8.	Perhitungan Beban Imbalan Kerja PSAK - 24 Calculation of Employee Benefits Expenses in accordance with PSAK-24	Merupakan pekerjaan rutin setiap tahun sebagai salah satu langkah perusahaan untuk mengetahui kewajiban jangka panjang Perusahaan atas jasa yang telah diberikan Pekerja. This is an annual routine activity as one of the company's steps to determine the company's long-term obligations for services rendered by employees.
9.	Penyesuaian Kebijakan Kesejahteraan Pekerja Berdasarkan Kesepakatan PKB Adjustment of Employee Welfare Policies Based on the Collective Labor Agreement	Merupakan tindak lanjut atas hasil kesepakatan PKB periode 2025 - 2027 terkait bidang kesejahteraan dan fasilitas bagi Pekerja. This is a follow-up to the results of 2025-2027 CLA regarding employee welfare and facilities.
10.	Restrukturisasi Organisasi Organizational Restructuring	Melakukan evaluasi dan restrukturisasi organisasi untuk mendukung strategi Pelindo, melalui struktur organisas dan *job grading* yang *agile*, serta tidak adanya tumpang tindih dalam fungsi dan peran sehingga meningkatkan efisiensi. Conducting organizational evaluation and restructuring to support Pelindo's strategy, through an agile organizational structure and job grading, as well as eliminating overlapping functions and roles, thereby increasing efficiency.

3. Group Pengelolaan SDM

2. **Human Capital Management Group**

No.	Rencana Kerja Work Plan	Deskripsi Description
1.	Penyusunan *Framework Learning Journey* Developing a Learning Journey Framework	Membangun *framework* pembelajaran sistematis dan terstruktur. Establishing a systematic and structured learning framework.
2.	*Fundamental Skill Improvement Program*	Program peningkatan keterampilan dasar (fundamental *skills*) bagi seluruh pekerja Pelindo yang dirancang mendukung peningkatan produktivitas, dan membangun perilaku *customer-centric* di seluruh lini organisasi. A fundamental skills improvement program for all Pelindo employees designed to support increased productivity and foster customer-centric behavior across the organization.
3.	*Knowledge Management Optimization Program*	Penguatan *smart knowledge worker* Pelindo dan Optimalisasi *Knowledge Hub* dalam Pelindo *Group*. Strengthening Pelindo's smart knowledge workers and optimizing the Knowledge Hub within Pelindo Group.

No.	Rencana Kerja Work Plan	Deskripsi Description
4.	*Key Enablers Business Academies*	Academy yang dirancang guna memenuhi dan mempertajam kompetensi terkait komoditas, *supply chain, hinterland,* dan *global partnership*. An academy designed to meet and hone competencies related to commodities, supply chain, hinterland, and global partnerships.
5.	*Leadership Forum*	Forum diskusi dan podcast tematik untuk pemimpin di berbagai level, membahas topik-topik strategis, kepemimpinan dan budaya. Discussion forums and thematic podcasts for leaders at various levels, addressing strategic topics, leadership, and culture.
6.	*Growth Leadership Program*	Pengembangan kompetensi kepemimpinan perlu dilakukan guna mempersiapkan para pekerja *non top talent* yang berada di posisi struktural untuk menghadapi perubahan yang dihadapi oleh Pelindo di masa yang akan datang. Sejalan dengan proyek Inisiatif Strategi HC *Roadmap* pada tahun 2025. Leadership competency development is necessary to prepare non-top talent in structural positions to face the changes Pelindo will face in the future. This is in line with the HC Roadmap Strategic Initiative project by 2025.
7.	*ESG Skill Development Program*	Program peningkatan kapabilitas SDM dalam keamanan digital dan *cyber resilience* agar mampu melindungi sistem operasi pelabuhan dan data strategis perusahaan serta meningkatkan pemahaman pekerja terkait *sustainability*, *green port*, dan ESG *compliance*. A program to improve HR capabilities in digital security and cyber resilience to protect port operating systems and strategic company data, as well as improve employee understanding of sustainability, green ports, and ESG compliance.
8.	Program Pendidikan Pasca Sarjana Postgraduate Education Program	Menyediakan fasilitas untuk pekerja yang ingin melanjutkan program pendidikan formal jenjang S2 di luar negeri. Providing facilities for employees wishing to pursue formal postgraduate education abroad.
9.	*Core Business Academies*	Program untuk membekali pekerja khususnya pada bidang operasional pada terminal yang belum serah terima operasi ke *Subholding* untuk meningkatkan kompetensi dalam bidang bisnis inti. Programs to equip employees, particularly those in operational areas at terminals that have not yet been handed over to Subholdings, to enhance their competencies in core business areas.
10.	*Integrated Leadership Program*	Pengembangan kompetensi kepemimpinan perlu dilakukan guna mempersiapkan para pekerja *top talent* yang berada di posisi struktural untuk menghadapi perubahan yang dihadapi oleh Pelindo di masa yang akan datang. Sejalan dengan proyek Inisiatif Strategi HC *Roadmap* pada tahun 2025, Pengelolaan SDM akan melanjutkan program pengembangan kepemimpinan yang sudah berjalan sejak tahun 2024. Leadership competency development is necessary to prepare top talent in structural positions to face the changes Pelindo will face in the future. In line with the HC Roadmap Strategic Initiative project by 2025, Human Capital Management will continue the leadership development program that has been running since 2024.
11.	Standarisasi Design Asesmen Kompetensi Pekerja Pelindo *Group* Standardization of Pelindo Group Employee Competency Assessment Design	Standarisasi asesmen kompetensi pekerja Pelindo *Group*. Standardization of competency assessments for Pelindo Group employees.
12.	*Enhancement Modul Talent Management System* dan *Performance Management System* pada aplikasi *Portaverse* Enhancement of the Talent Management System and Performance Management System Modules in Portaverse application	Integrasi data-data pendukung pengelolaan *talent*, pengembangan internal asesmen sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan serta peningkatan *performance management system.* Integration of supporting data for talent management, development of internal assessments to inform decision-making, and improvement of the performance management system.

No.	Rencana Kerja Work Plan	Deskripsi Description
13.	*Culture Transformation*	Melakukan transformasi budaya perusahaan yang secara spesifik mendukung pencapaian visi perusahaan menjadi pemimpin ekosistem maritim terintegrasi dan berkelas dunia melalui optimalisasi pengelola budaya dan *Change Catalyst Team* untuk memastikan proses internalisasi terjadi sampai unit terkecil. Transforming the corporate culture specifically to support the company's vision of becoming a world-class, integrated maritime ecosystem leader through optimizing cultural management and the Change Catalyst Team to ensure internalization at the lowest level.

4. Group Layanan SDM

3. HC Services Group

No.	Rencana Kerja Work Plan	Deskripsi Description
1.	Peraturan Direksi tentang Tenaga Alih Daya (TAD) Board of Directors Regulation on Outsourcing (TAD)	Pelaksanaan penyeragaman komponen penghasilan dan penyesuaian pengelolaan TAD sesuai dengan Perdir TAD. Implementation of standardization of revenue components and adjustment of TAD management in accordance with TAD Director Regulation.
2.	Transformasi Layanan SDM menjadi *Strategic Business Partner* Transforming HC Services into Strategic Business Partners	RKM ini bertujuan untuk mengubah paradigma dan peran fungsi SDM dari peran yang bersifat administratif dan transaksional menjadi mitra strategis bagi bisnis. Transformasi ini dilakukan dengan mengembangkan kapabilitas, keterampilan, dan pola pikir tim SDM agar dapat memberikan masukan yang berdampak langsung pada pencapaian tujuan bisnis perusahaan. This RKM aims to shift the paradigm and role of HC function from an administrative and transactional role to a strategic partner for the business. This transformation is carried out by developing the capabilities, skills, and mindset of HC team so they can provide input that directly impacts the achievement of the company's business goals.
3.	*Frontliner Brand Ambassador* membangun budaya *service excellence* Frontliner Brand Ambassadors Building a Culture of Service Excellence	Pelatihan khusus untuk tim *resepsionis, security, Cleaning service, Driver,* dan *staff* Umum agar di seluruh indonesia sama dan memahami nilai-nilai perusahaan dan bagaimana cara menyampaikannya melalui perilaku, sikap dan komunikasi. Special training for receptionists, security, cleaning service, drivers, and general staff is underway to ensure a uniform understanding of the company's values and how to convey them through behavior, attitude, and communication.
4.	Efisiensi aset, dari biaya menjadi Laba Asset Efficiency: From Cost to Profit	Melakukan inventarisasi terhadap rumah dinas oleh umum untuk komersialisasi. Conducting an inventory of official residences owned by the general staff for commercialization.
5.	Pekerjaan Penyediaan Fasilitas Kerja Kantor Pusat Head Office Work Facility Provision	Pekerjaan penyediaan fasilitas kerja diperlukan untuk mendukung *relayout* ruang kerja *Group* Layanan Keuangan dan Perpajakan serta memenuhi kebutuhan ruang kerja Kantor Pusat bagi *group*/divisi yang saat ini masih berkantor di luar Gedung Pelindo Tower. Kebutuhan ini timbul akibat adanya perubahan Struktur Organisasi Perusahaan (STO), yang menyebabkan perlunya penataan ulang fasilitas kerja agar seluruh unit kerja dapat terakomodir secara optimal di dalam gedung utama perusahaan. Work facilities are needed to support the relayout of Financial Services and Taxation Group's workspace and to meet the workspace needs of Head Office for groups/divisions currently operating outside Pelindo Tower Building. This need arises from changes in the Company's Organizational Structure (STO), which necessitates a reorganization of work facilities so that all work units can be optimally accommodated within the company's main building.
6.	Implementasi *Employee Wellbeing Policy* Implementation of Employee Wellbeing Policy	Mendukung program-program Baporkes Pelindo dalam rangka meningkatkan kuliatas kesehatan fisik dan mental Pekerja. Supporting Pelindo's Baporkes programs to improve the physical and mental health of workers.
7.	*Smartpartnership with Union*	Implementasi PKB di Bidang Layanan SDM. Implementation of PKB in the Human Capital Services Sector.
8.	Penyaluran Bantuan kepada Pensiunan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Distribution of Assistance to Retirees of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	Dalam rangka membantu memenuhi kebutuhan pensiunan menjelang hari raya dengan penyaluran Bantuan Uang Sembako kepada Pensiunan PT Pelabuhan Indonesia (Persero), yang biasanya diberikan menjelang Hari Raya Idul Fitri. To help meet the needs of retirees approaching the holidays by distributing basic food assistance to retirees at PT Pelabuhan Indonesia (Persero), which is usually given before Eid al-Fitr.

No.	Rencana Kerja Work Plan	Deskripsi Description
9.	HC *Process & Services Refinement*	Efisiensi dan simplifikasi proses-proses administrasi serta pemberian layanan kepada pekerja. Beberapa layanan tersebut antara lain: Layanan kepada pekerja yang mutasi • Evaluasi kehadiran • Perjalanan dinas • Kenaikan merit dan gaji pokok • Administrasi bagi pekerja yang akan pensiun • Percepatan pemrosesan tagihan travel agent yang melayani perjalanan dinas pekerja • Benefit kepada pekerja • Integrasi dengan data-data TAD di PDS, ISMA & TEDS • Integrasi dua arah antara *Portaverse* dengan SAP HCM untuk proses yang berkaitan • Tindak lanjut atas *Post Implementation Review* (PIR) SAP HCM & *Surrounding System* Efficiency and simplification of administrative processes and service delivery to workers. Some of these services include: • Services for transferred workers • Attendance evaluation • Business travel • Merit and base salary increases • Administration for workers approaching retirement • Accelerated processing of travel agent invoices for workers on business trips • Benefits to workers • Integration with TAD data in PDS, ISMA, and TEDS • Two-way integration between Portaverse and SAP HCM for related processes • Follow-up on the Post-Implementation Review (PIR) of SAP HCM and Surrounding System
10.	Pelindo HR 360° *Data System*	Peningkatan integrasi data SDM pada lingkup seluruh aplikasi HRIS melalui penambahan integrasi maupun kajian terhadap integrasi eksisting untuk memastikan kelengkapan penyimpanan data dan konsistensi serta integritas data dalam proses integrasi. Fokus utama dalam tahap ini adalah: • Pengembangan integrasi dengan P-Well yang mengelola data kesehatan Pra dan MCU Pekerja. P-Well diharapkan dapat terintegrasi dengan seluruh digital arsip SDM (personal file, cuti, *payroll*, perjalanan dinas, *training*). • Pengembangan *workforce productivity dashboard* untuk mendukung transformasi layanan SDM menjadi *strategic business partner*. • Mulai dilakukan eksplorasi implementasi *predictive analytics* berdasarkan data-data yang telah tersedia seperti prediksi absensi tinggi dan prediksi pekerja yang akan resign. Improving HC data integration across all HRIS applications through additional integrations and reviewing existing integrations to ensure completeness of data storage, consistency, and integrity throughout the integration process. The main focus of this phase is: • Developing integration with P-Well, which manages employee pre- and MCU health data. P-Well is expected to be integrated with all digital HR archives (personal files, leave, payroll, business travel, training). • Developing a workforce productivity dashboard to support the transformation of HC services into a strategic business partner. • Exploring the implementation of predictive analytics based on existing data, such as predicting high absenteeism and employee turnover.
11.	*Joint Procurement* Seragam Dinas Joint Procurement of Official Uniforms	Kebutuhan Seragam Dinas Tahun 2026. Requirements for Office Uniforms in 2026.

No.	Rencana Kerja Work Plan	Deskripsi Description
12.	Pemenuhan kebutuhan Cetakan, ATK, Fotokopi, Pengiriman surat dan barang Provision of Printing, Stationery, Photocopying, and Mail and Goods Delivery Needs	Penyediaan permintaan kebutuhan Cetakan, ATK, Fotokopi, Pengiriman surat dan barang dalam rangka kelancaran kegiatan administrasi Perusahaan. Provision of printing, stationery, photocopying, mailing, and goods delivery requests to ensure the smooth running of the Company's administrative activities.
13.	Pengelolaan Kearsipan Archives Management	Deskripsi: Pengelolaan Kearsipan yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip, secara efisien, efektif, dan sistematis. terdiri dari Penataan arsip aktif, penataan arsip inaktif, penyusutan arsip, dan pelaksanaan budaya arsip di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Description: Management of archives directly used in the activities of archive creators, efficiently, effectively, and systematically. This includes organizing active archives, organizing inactive archives, reducing archives, and implementing an archive culture within PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

PELINDO
INDONESIA MARITIME GATEWAY

Teknologi Informasi

Information Technology

www.pelindo.co.id

Teknologi Informasi
Information Technology

Teknologi informasi (TI) telah menjadi hal penting bagi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dalam mewujudkan visi misi menjadi pelabuhan kelas dunia serta memberikan pengalaman baru bagi pelanggan dalam mendapatkan pelayanan perusahaan. Melalui teknologi informasi perusahaan menemukan cara baru dalam melaksanakan kegiatan agar lebih efektif dan efisien. Hal ini dibuktikan dengan implementasi solusi *information technology* (IT) diseluruh proses bisnis perusahaan. Mulai dari implementasi aplikasi portal pelayanan pelanggan, pelayanan kapal, pelayanan terminal, implementasi sistem untuk proses keuangan dan proses *back office* lainnya.

Secara umum, implementasi teknologi informasi berfokus kepada tiga tujuan yaitu:

1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi proses bisnis yang ada diperusahaan melalui integrasi aplikasi dan implementasi single aplikasi untuk menghilangkan proses serupa dan berulang.
2. Peningkatan pendapatan dan pengurangan biaya melalui *real-time transaction* menggunakan aplikasi yang bersifat *online*;
3. Pengendalian yang lebih baik terhadap kinerja perusahaan dan kemudahan dalam pengambilan keputusan dengan memanfaatkan *executive summary dashboard system*.

Information technology (IT) has become essential for PT Pelabuhan Indonesia (Persero) in realizing its vision and mission to become a world-class port and to provide a new experience for customers in accessing the Company's services. Through information technology, the Company discovers new ways of conducting its activities more effectively and efficiently. This is demonstrated by the implementation of IT solutions across all business processes, ranging from customer service portal applications, vessel services, terminal services, to systems supporting financial processes and other back-office operations.

In general, the implementation of information technology focuses on three main objectives:

1. Improving the effectiveness and efficiency of the Company's business processes through application integration and the implementation of a single application to eliminate similar and repetitive processes.
2. Increasing revenue and reducing costs through real-time transactions using online applications.
3. Enhancing control over the Company's performance and facilitating decision-making through the use of executive summary dashboard systems.

Master Plan dan Strategi Teknologi informasi

Information Technology Master Plan and Strategy

Sesuai arahan dari Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), telah disusun IT *Master Plan* PT Pelabuhan Indonesia (Persero) periode 2022 – 2026 yang selaras dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan 2021 – 2025. Dalam IT *Master Plan* (ITMP) visi IT PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yaitu sebagai *enabler* bagi bisnis untuk integrasi ekosistem dan menuju *world class port*. Untuk mencapai visi tersebut maka dijabarkan inisiatif yang tercantum dalam IT *Roadmap* yang terdapat 12 inisiatif utama antara lain, *Journey to Cloud, enhancement Single Enterprise Resource Planning* (ERP), *Enterprise Datawarehouse*, konsolidasi dan *enhancement Terminal Operating System* (TOS), dan lainnya.

Selain itu, di dalam ITMP juga dijabarkan IT *Operation Model* (ITOM) yang berfungsi untuk menunjukan model operasi bagian IT dalam berhubungan dengan *stakeholder* terkait untuk mencapai visi IT PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Beberapa hal yang dijabarkan dalam ITOM antara lain IT *Forum* dan IT *Steering Committee*. IT Forum adalah wadah bagi tim IT di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) *Group* untuk berdiskusi dan melakukan *monitoring progress* yang diselenggarakan secara rutin. Sedangkan IT *Steering Committee* adalah wadah yang terdiri dari Direksi dan manajemen di *holding* yang berfungsi untuk memberi arahan dan mengambil keputusan terhadap hal-hal yang bersifat strategis. Selain hal-hal tersebut, IT *Master Plan* juga berisikan mengenai IT *enterprise architecture*, tren Teknologi Informasi, dan lainnya. Dengan demikian, Perseroan dapat berjalan dengan prinsip *Good Corporate Governance* dengan dukungan teknologi dan meminimalkan distrupsi teknologi di era 4.0.

Pada Tahun 2025, Teknologi Informasi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) mengusung tema *"Growth & Sustain"*. Beberapa inisiatif rencana strategis yang dijalankan pada tahun 2025 adalah:

1. CRM & *Partnership Enablement*;
2. Implementasi dan konsolidasi aplikasi rekrutmen;
3. Implementasi aplikasi properti dan *asset management*;
4. Implementasi aplikasi *energy & utility management*;
5. Peningkatan kapabilitas *digital workplace*;
6. Implementasi *Identity Access Management* (IAM).

In accordance with the direction of the Ministry of State-Owned Enterprises (SOEs), the IT Master Plan of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) for 2022–2026 period has been developed in alignment with the Company's Long-Term Plan for 2021–2025. Within the IT Master Plan (ITMP), PT Pelabuhan Indonesia (Persero)'s IT vision is to act as a business enabler for ecosystem integration and to achieve a world-class port. To realize this vision, initiatives are outlined in the IT Roadmap, which includes 12 main initiatives such as Journey to Cloud, enhancement of a Single Enterprise Resource Planning (ERP), Enterprise Data Warehouse, consolidation and enhancement of Terminal Operating System (TOS), and others.

In addition, the ITMP also describes IT Operation Model (ITOM), which serves to define the operational model of the IT function in relation to stakeholders in achieving the Company's IT vision. Key elements described in the ITOM include IT Forum and IT Steering Committee. The IT Forum serves as a platform for IT teams across PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Group to discuss and monitor progress regularly. Meanwhile, the IT Steering Committee, consisting of Board of Directors and holding management, functions to provide direction and make decisions on strategic matters. The IT Master Plan also covers IT enterprise architecture, information technology trends, and other aspects. Through this approach, the Company operates in accordance with Good Corporate Governance principles, supported by technology while minimizing technological disruptions in the Industry 4.0 era.

In 2025, the Information Technology function of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) adopted the theme "Growth & Sustain." Several strategic initiatives implemented during 2025 include:

1. CRM & Partnership Enablement;
2. Implementation and consolidation of recruitment applications;
3. Implementation of property and asset management applications;
4. Implementation of energy and utility management applications;
5. Enhancement of digital workplace capabilities;
6. Implementation of Identity Access Management (IAM).

Pengembangan Teknologi Informasi
Information technology development

Pada tahun 2025, Pelindo telah melakukan berbagai pengembangan dan implementasi IT guna mendukung dan meningkatkan nilai tambah untuk meningkatkan produktivitas serta mengedepankan pengalaman baru bagi pelanggan. Adapun pengembangan dan implementasi yang telah dilakukan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. **Pengembangan dan Implementasi Aplikasi Dukungan Digitalisasi Proses Bisnis Non Operasional *(Back End)*:**
   a. *Roll-out* layanan *Single* ERP di 34 (tiga puluh empat) entitas di lingkungan Pelindo *Group*;
   b. Implementasi aplikasi Portaverse meliputi *talent & performance, learning, knowledge management system;*
   c. *Enhancement & rollout* aplikasi *Surrounding Single* ERP Pelindo *Group* seperti:
      - Aplikasi Portal pegawai (MyPelindo);
      - Aplikasi pengelolaan absensi pegawai (P-CiCo);
      - Aplikasi pengelolaan perjalanan dinas pekerja (Pelindo Travel);
      - Aplikasi pengelolaan proses *e-procurement* (Pelindo E-proc);
      - Aplikasi pengelolaan kas operasional (BIOS);

In 2025, Pelindo carried out various IT developments and implementations to support and enhance added value, improve productivity, and deliver new customer experiences. The developments and implementations carried out in 2025 are as follows:

1. **Application Development and Implementation Support for Digitalization of Non-Operational (Back-End) Business Processes:**
   a. Roll-out of Single ERP services across 34 entities within Pelindo Group;
   b. Implementation of Portaverse application, including talent & performance, learning, and knowledge management systems;
   c. Enhancement and roll-out of surrounding Single ERP applications within Pelindo Group, such as:
      - Employee portal application (MyPelindo);
      - Employee attendance management application (P-CiCo);
      - Business travel management application (Pelindo Travel);
      - E-procurement management application (Pelindo E-Proc);
      - Operational cash management application (BIOS);

- Aplikasi pengelolaan investasi korporat (Peluit);
- Aplikasi pengelolaan surat dinas (Pelindo *E-Office*).

d. Implementasi sistem *call center* keluhan pelanggan, yang terdiri dari:
   - Implementasi *channel call center* keluhan pelanggan dengan teknologi *omni channel*;
   - Implementasi sistem pencatatan keluhan pelanggan dengan menggunakan *tools IT Service Management* (ITSM);
   - Penyediaan fasilitas IT pendukung dalam pelaksanaan proses keluhan pelanggan.

e. *Enhancement* sistem *project management;*

f. Simplifikasi proses bisnis korporat (Non-Operasional), yang terdiri dari:
   - Sentralisasi proses approval (PR dan PO, penerimaan *Good Receipt* penggunaan anggaran Capex, serta park jurnal) di portal Pekerja My Pelindo;
   - Otomatisasi proses *revenue sharing*;

g. Digitalisasi dan *enhancement* proses perpajakan, yang terdiri dari:
   - Integrasi dengan Dirjen Pajak untuk proses pengecekan keaslian NPWP pelanggan (SimTax);
   - Implementasi dan digitalisasi PSAK 71;
   - Pengiriman data pajak ke Aplikasi Coretax (Aplikasi Direktorat Jendral Pajak).

h. Standarisasi aplikasi *back office,* termasuk:
   - Aplikasi pengelolaan *meeting* koordinasi *Top Management* (P-BOSS);
   - Aplikasi pengelolaan peralatan pelabuhan (SIGAP);
   - Aplikasi pengelolaan aset tetap (SIAP);
   - Aplikasi pengelolaan Rencana Kerja Management (P-RKM);
   - Aplikasi pengelolaan *Key Performance Indicator* korporat (P-KPI);
   - Aplikasi pengelolaan *Good Corporate Governance* (P-GOOD);
   - Aplikasi pengelolaan proses *Internal Control Over Financial Reporting* (PICO);
   - Aplikasi pengelolaan kas operasional (BIOS);
   - Aplikasi pengelolaan proses sistem manajemen (*Integrated Management System*);
   - Aplikasi pengelolaan risiko korporat (Prima);
   - Aplikasi pengelolaan *customer engagement* (P-Connect)*;*
   - Aplikasi pengelolaan pengadaan barang dan jasa (Pelindo *E-Procurement*);
   - Pengembangan fitur *Contract Management System* pada aplikasi pengadaan (Pelindo *E-Procurement*);
   - Digitalisasi proses vendor payment pada aplikasi pengadaan (Pelindo *E-Procurement*);
   - Penerapan *e-sign* dan *e*-materai untuk tanda tangan dan pembubuhan materai bersama dengan pihak di luar Pelindo;

- Corporate investment management application (Peluit);
- Official correspondence management application (Pelindo E-Office).

d. Implementation of a customer complaint call center system, including:
   - Omni-channel call center technology;
   - Complaint recording system using IT Service Management (ITSM) tools;
   - Provision of supporting IT facilities for complaint handling processes.

e. Enhancement of the project management system;

f. Simplification of corporate (non-operational) business processes, including:
   - Centralization of approval processes (PR and PO, goods receipt, Capex budget usage, and journal posting) in the MyPelindo employee portal;
   - Automation of revenue-sharing processes.

g. Digitalization and enhancement of tax processes, including:
   - Integration with the Directorate General of Taxes for NPWP validation (SimTax);
   - Implementation and digitalization of PSAK 71;
   - Submission of tax data to the Coretax application (Directorate General of Taxes system).

h. Standardization of back-office applications,
   - Including systems for managing top management coordination meetings (P-BOSS);
   - Port equipment management application (SIGAP);
   - Fixed assets management application (SIAP);
   - Management Work Plan Application (P-RKM);
   - Corporate Key Performance Indicator (P-KPI) management application;
   - Good Corporate Governance Management Application (P-GOOD);
   - Internal Control over Financial Reporting (ICFR) management application;
   - Operational cash management application (BIOS);
   - Integrated Management System application;
   - Corporate risk management application (Prima);
   - Customer engagement management application (P-Connect);
   - Procurement application (Pelindo E-Procurement);
   - Development of the Contract Management System within the procurement application (Pelindo E-Procurement);
   - Vendor payment digitisation application (Pelindo E-Procurement);
   - E-signatures and e-stamping for signing and affixing stamps in conjunction with parties outside Pelindo;

- Aplikasi pengelolaan/manajemen arsip perusahaan (*P-Ercent)*;
- Aplikasi pengelokaan Rencana Kerja *Manajement* (P-RKM);
- Aplikasi pengelolaan *Key Performance* Indicator (P-KPI);
- Aplikasi pengelolaan investasi korporat (Peluit);
- Aplikasi *Audit Management System* (AMS).

i. *Maritime connectivity hub* yaitu portal layanan pelabuhan yang mengintegrasikan *ecosystem* maritim seperti *shipping line, cargo owner, freight forwarder, trucking company*;
j. Penyusunan desain standarisasi *customer portal;*
k. Adopsi teknologi AI untuk proses *back office*;
l. *Enhancement Single Master Data Management* (MDM);
m. Implementasi *big data analytics*
Pembentukan integrasi data, *data warehouse*, dan visualisasi data yang informatif, termasuk pekerjaan sebagai berikut:
   - Pekerjaan *Dashboard* SSC Pengadaan;
   - Pekerjaan *Dashboard* Management Investasi;
   - Pekerjaan *Dashboard* Kinerja Operasi;
   - Pekerjaan *Dashboard Planning Control Monitoring Center* (PCMC);
   - Pekerjaan *Dashboard* Komersial;
   - Pekerjaan *Dashboard* Keuangan.

Dukungan Digitalisasi Proses Bisnis Operasional (Layanan Aplikasi *Front End)*:

a. Konsolidasi & *enhancement* aplikasi *Integrated Billing System* (IBS);
b. Pegembangan aplikasi pengelolaan aset lahan serta fasilitas komersialisasi (Aplikasi *Promote*);
c. Standardisasi aplikasi layanan operasional untuk layanan kapal, petikemas, dan barang:
   - Standardisasi pelayanan kapal (Phinisi) telah diimplementasikan pada 87 (delapan puluh tujuh) atau 100% dari cabang pelabuhan Pelindo *Group* sampai dengan tahun 2025;
   - Standardisasi pelayanan non petikemas melalui implementasi aplikasi PTOS-M pada 78 (tujuh puluh delapan) atau 90% dari terminal Pelindo *Group* sampai akhir tahun 2025;
   - Standarisasi pelayanan petikemas melalui implementasi aplikasi PTOS-PK telah diimplementasikan pada 41 (empat puluh satu) atau 90% dari terminal Pelindo *Group* sampai akhir tahun 2025;
   - Standarisasi pelayanan Ro-Ro dan penumpang melalui implementasi aplikasi PTOS-R telah diimplementasikan pada 49 (empat puluh sembilan) atau 100% dari terminal Pelindo *Group* sampai akhir tahun 2025;

- Document archive management application (P-Ercent);
- Work Plan Management application (P-RKM);
- Key Performance Indicator management application (P-KPI);
- Corporate investment management application (Peluit);
- Audit Management System (AMS) application.

i. Maritime connectivity hub as a port service portal integrating the maritime ecosystem such as shipping lines, cargo owners, freight forwarders, and trucking companies;
j. Development of standardized customer portal design;
k. Adoption of AI technology for back-office processes;
l. Enhancement of Single Master Data Management (MDM);
m. Implementation of big data analytics
The development of data integration, data warehouses and informative data visualisations, including the following projects:
   - Procurement SSC Dashboard Project;
   - Investment Management Dashboard Project;
   - Operational Performance Dashboard Project;
   - Planning Control Monitoring Centre (PCMC);
   - Commercial Dashboard Project;
   - Financial Dashboard Project.

Support for Digitalization of Operational (Front-End Business Processes:

a. Consolidation and enhancement of the Integrated Billing System (IBS);
b. Development of land asset management and commercialization applications (Promote);
c. Standardization of operational service applications for vessel, container, and cargo services, including:
   - Vessel service standardization (Phinisi) implemented in 87 ports (100% of Pelindo Group ports) by 2025;
   - Standardisation of non-containerised cargo services through implemented of the PTOS-M application at 78 (seventy-eight) or 90% of Pelindo Group by the end of 2025;
   - Standardisation of container services through the implementation of the PTOS-PK application has implemented at 41 (forty-one) or 90% of Pelindo Group terminals by the end of 2025;
   - Standardisation of Ro-Ro and passenger services through the implementation of the PTOS-R application has implemented at 49 (forty-nine) or 100% of Pelindo Group terminals by the end of 2025;

2. **Peningkatan Infrastruktur dan Keamanan Sistem Informasi**
   a. Transformasi Infrastruktur *On Premise* ke *Cloud*;
   b. Pertukaran data terintegrasi melalui Pelindo Hub;
   c. Standarisasi layanan *corporate email;*
   d. Integrasi layanan CCTV;
   e. Peningkatan kapabilitas *Security Operation Center* (SOC);
   f. Pengesahan Kebijakan Keamanan Sistem Informasi;
   g. Pengukuran Maturitas Keamanan Sistem Informasi oleh BSSN;
   h. Standardisasi & implementasi *Secure Access Service Edge* (SASE);
   i. Penentuan objek Infrastruktur Informasi Vital (IIV);
   j. Implementasi *Security Information & Event Management* (SIEM);
   k. Pembentukan *Cyber Security Incident Response Team* (CSIRT);
   l. Sertifikasi personel yang menangani Keamanan Sistem Informasi.

3. **Penyusunan IT *Strategic Management and Governance***
   a. Kajian implementasi *Data Loss Prevention* (DLP);
   b. Penilaian dan peningkatan maturitas kapabilitas TI;
   c. Desain implementasi *enterprise architecture tools;*
   d. Penyusunan *IT Service Catalogue;*
   e. *Monitoring* dan Evaluasi *IT General Control;*
   f. Pengesahan Kebijakan Pelindungan Data Pribadi (PDP);
   g. Implementasi monitoring dan evaluasi *Internal Control Over Financial Report* (ICOFR);
   h. Pelaksanaan *Disaster Recovery Plan* (DRP) dan penyusunan *Business Continuity Plan* (BCP) untuk proses IT.

4. **Digitalisasi Pelindo untuk Mendukung Program Pemerintah**
   a. Implementasi Integrasi PAB (Pemberitahuan Perdagangan Antarpulau Barang) dengan Kementerian Dalam Negeri di 23 (dua puluh tiga) pelabuhan;
   b. Integrasi dengan INAPORTNET
      Pelindo telah mengembangkan dan mengimplementasikan aplikasi Phinnisi untuk mendukung kegiatan pelayanan kapal *(ship clearance)* yang terintegrasi dengan INAPORTNET pada 87 (delapan puluh tujuh) pelabuhan.
   c. Pertukaran data dengan *platform National Logistic Ecosystem* (NLE) dan *Indonesia National Single Window* (INSW) melalui Pelindo Hub.
      Pelindo telah mengintegrasikan data kepelabuhanan dengan NLE dan INSW.

2. **Enhancement of IT Infrastructure and Security**
   a. Transformation from on-premise infrastructure to cloud;
   b. Integrated data exchange through Pelindo Hub;
   c. Standardization of corporate email services;
   d. Integration of CCTV services;
   e. Enhancement of Security Operation Center (SOC) capabilities;
   f. Establishment of Information Security Policies;
   g. Measurement of information security maturity by BSSN;
   h. Implementation of Secure Access Service Edge (SASE);
   i. Identification of Vital Information Infrastructure (IIV);
   j. Implementation of Security Information & Event Management (SIEM);
   k. Establishment of a Cyber Security Incident Response Team (CSIRT);
   l. Certification of personnel responsible for information security.

3. **Development of IT Strategic Management and Governance**
   a. Assessment of Data Loss Prevention (DLP) implementation;
   b. Evaluation and improvement of IT capability maturity;
   c. Design of enterprise architecture tools implementation;
   d. Development of IT Service Catalogue;
   e. Monitoring and evaluation of IT General Controls;
   f. Establishment of Personal Data Protection (PDP) Policy;
   g. Implementation of monitoring and evaluation of Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR);
   h. Implementation of Disaster Recovery Plan (DRP) and preparation of Business Continuity Plan (BCP) for IT processes.

4. **Pelindo Digitalization to Support Government Programs**
   a. Implementation of PAB (Inter-Island Goods Trade Notification) integration with the Ministry of Home Affairs at 23 (twenty-three) ports;
   b. Integration with INAPORTNET
      Pelindo has developed and implemented the Phinnisi application to support ship clearance services integrated with INAPORTNET at 87 (eighty-seven) ports.
   c. Data exchange with the National Logistics Ecosystem (NLE) and Indonesia National Single Window (INSW) platforms through the Pelindo Hub.
      Pelindo has integrated port data with the NLE and INSW.

Implementasi *Delivery Order* (DO) *Online* & Surat Permintaan Pengeluaran (SP2) *Online* hingga tahun 2025 sudah terimplementasi di semua terminal petikemas Pelindo *Group*.

d. Implementasi *auto gate system* di Pelabuhan
Pelindo telah mengimplementasikan *auto gate system* yang terintegrasi dengan Bea Cukai untuk kegiatan *gate* lini 1 dan *gate* pelabuhan (*gatepass*). Per 2025 sudah diimplementasikan di 25 (dua puluh lima) pelabuhan.

e. Simplifikasi proses bisnis pelayanan kapal, *Single Submission* SSM Pengangkut dan SSM *Quarantine & Customs.*
Mengkonsolidasikan *order management* yang dilakukan oleh *shipping agent* ke dalam satu portal dalam rangka simplifikasi proses bisnis, sehingga pengguna jasa dapat melakukan permintaan layanan didalam satu aplikasi. Per 2025 SSM Pengangkut sudah diimplementasikan di 87 (delapan puluh tujuh) pelabuhan, sedangkan SSM QC di 6 (enam) pelabuhan (100% dari target).

f. Implementasi *single truck identification* (STID)
Pelindo telah mengimplementasikan layanan *single truck identification* (STID) pada 29 (dua puluh sembilan) pelabuhan sebagai standard identitas truck yang beroperasi di seluruh Indonesia.

g. Implementasi *Truck Booking System* (TBS) di 6 (enam) dari 6 (enam) target pelabuhan.

h. Pertukaran data pelaporan data trafik produksi dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

Implementation of online Delivery Orders (DO) and online Release Request Letters (SP2) has been implemented at all Pelindo Group container terminals by 2025.

d. Implementation of an auto-gate system at ports
Pelindo has implemented an auto-gate system integrated with Customs and Excise for line 1 gate and port gate (gatepass) activities. By 2025, it will have been implemented in 25 (twenty-five) ports.

e. Simplification of ship service business processes, including Single Submission SSM for Carriers and SSM for Quarantine & Customs.
Consolidation of order management carried out by shipping agents into a single portal to simplify business processes, allowing service users to submit service requests within a single application. By 2025, SSM for Carriers will have been implemented in 87 (eighty-seven) ports, while SSM for Quality Control will be implemented in 6 (six) ports (100% of the target).

f. Implementation of Single Truck Identification (STID).
Pelindo has implemented the Single Truck Identification (STID) service in 29 (twenty-nine) ports as the standard identification for trucks operating throughout Indonesia.

g. Implementation of the Truck Booking System (TBS) in 6 (six) of the 6 (six) target ports.

h. Exchange of production traffic reporting data with the Central Statistics Agency (BPS).

Infrastruktur Teknologi Informasi
Information Technology Infrastructure

Dalam rangka menunjang kebutuhan Layanan Teknologi Informasi, diperlukan peningkatan kualitas infrastruktur dan meningkatkan keamanan Teknologi Informasi. Pada Tahun 2025 telah dilakukan beberapa inisiatif sebagai berikut:

1. Pekerjaan *Virtualisasi Server*;
2. Pekerjaan Penyediaan Infrastruktur *Gate* Terminal Multipurpose;
3. Pekerjaan Implementasi *Privileged Access Management* di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
4. Pekerjaan Peremajaan Infrastruktur dan Jaringan di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
5. Pengelolaan sistem keamanan informasi yang meliputi :
   a. Penguatan Kapabilitas *Security Operation Center;*
   b. *Digital Forensics & Incident Response* (DFIR);
   c. *Domain Name System Security Extensions;*
   d. *End point Security*;
   e. *Database*;
   f. perangkat *peripheral* dan beberapa perangkat pendukung keamanan informasi lainnya.

To support the need for Information Technology Services, it is necessary to improve infrastructure quality and enhance Information Technology security. In 2025, several initiatives were implemented, as follows:

1. Server Virtualization Work;
2. Multipurpose Gate Terminal Infrastructure Provision Work;
3. Privileged Access Management Implementation Work within PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
4. Infrastructure and Network Rejuvenation Work within PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
5. Information security system management, including:
   a. Strengthening Security Operation Center Capabilities;
   b. Digital Forensics & Incident Response (DFIR);
   c. Domain Name System Security Extensions;
   d. Endpoint Security;
   e. Databases;
   f. Peripheral devices and several other information security support devices.

Tata Kelola Teknologi Informasi
Information Technology Governance

Implementasi Tata Kelola IT di Pelindo *Group* menggunakan *framework* COBIT 2019 dengan mengedepankan prinsip *Value delivery, Risk optimization, Resource optimization* serta *Performance measurement* yang melibatkan seluruh domain COBIT 2019 yakni:

1. *Evaluate, Direct, Monitor* (EDM);
2. *Align, Plan, Organize* (APO);
3. *Build, Acquire, Implement* (BAI);
4. *Deliver, Service, Support* (DSS);
5. *Monitor, Evaluate, Assess* (MEA).

The implementation of IT Governance at Pelindo Group uses the COBIT 2019 framework, emphasizing the principles of Value Delivery, Risk Optimization, Resource Optimization, and Performance Measurement. This framework encompasses all COBIT 2019 domains:

1. Evaluate, Direct, Monitor (EDM);
2. Align, Plan, Organize (APO);
3. Build, Acquire, Implement (BAI);
4. Deliver, Service, Support (DSS);
5. Monitor, Evaluate, Assess (MEA).

International Framework	*Description*
COBIT 2019	COBIT (*Control Objectives for Information and related Technology*) merupakan kerangka kerja (*framework*) pendukung tata kelola TI. COBIT mencakup kontrol yang terstruktur secara sistematis dan mudah dikelola serta dapat dipergunakan sebagai tools untuk membantu mengarahkan dan mengawasi aktivitas-aktivitas terkait TI. COBIT (Control Objectives for Information and related Technology) merupakan kerangka kerja (framework) pendukung tata kelola TI. COBIT mencakup kontrol yang terstruktur secara sistematis dan mudah dikelola serta dapat dipergunakan sebagai tools untuk membantu mengarahkan dan mnengawasi aktivitas-aktivitas terkait TI.
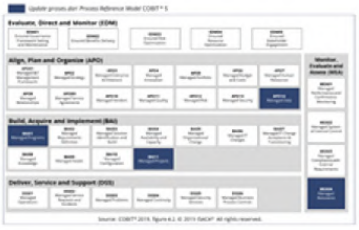	COBIT telah disesuaikan dengan berbagai *standard* dan *framework* yang ada (seperti ITIL v3, TOGAF® 9.2, CMMI, ISO/IEC 27001, dan lain-lain. Baik COBIT 5 maupun COBIT 2019 terdiri atas fungsi *governance* dan *management*, namun terdapat perbedaan jumlah proses, dimana COBIT 5 berjumlah 37 proses, sedangkan COBIT 2019 berjumlah 4 proses. Selain itu, COBIT® 2019 juga mendapat masukan dari *user community* untuk mendukung COBIT tetap *update* dan memberi manfaat bagi para penggunanya. COBIT telah disesuaikan dengan berbagai standard dan framework yang ada (seperti ITIL v3, TOGAF® 9.2, CMMI, ISO/IEC 27001, dan lain-lain. Baik COBIT 5 maupun COBIT 2019 terdiri atas fungsi governance dan management, bnamun terdapat perbedaan jumlah proses, dimana COBIT 5 berjumlah 37 proses, sedangkan COBIT 2019 berjumlah 4 proses. Selain itu, COBIT® 2019 juga mendapat masukan dari user community untuk mendukung COBIT tetap update dan memberi manfaat bagi para penggunanya.

ROADMAP TI

Roadmap IT yang dibuat untuk tahun 2022 – 2026, terdiri atas 71 inisiatif yang dirangkum dalam 12 inisiatif utama dengan 4 tema inisiatif utama sebagai berikut:

IT ROADMAP

The IT Roadmap, developed for 2022–2026, consists of 71 initiatives summarized in 12 key initiatives with four main initiative themes as follows:

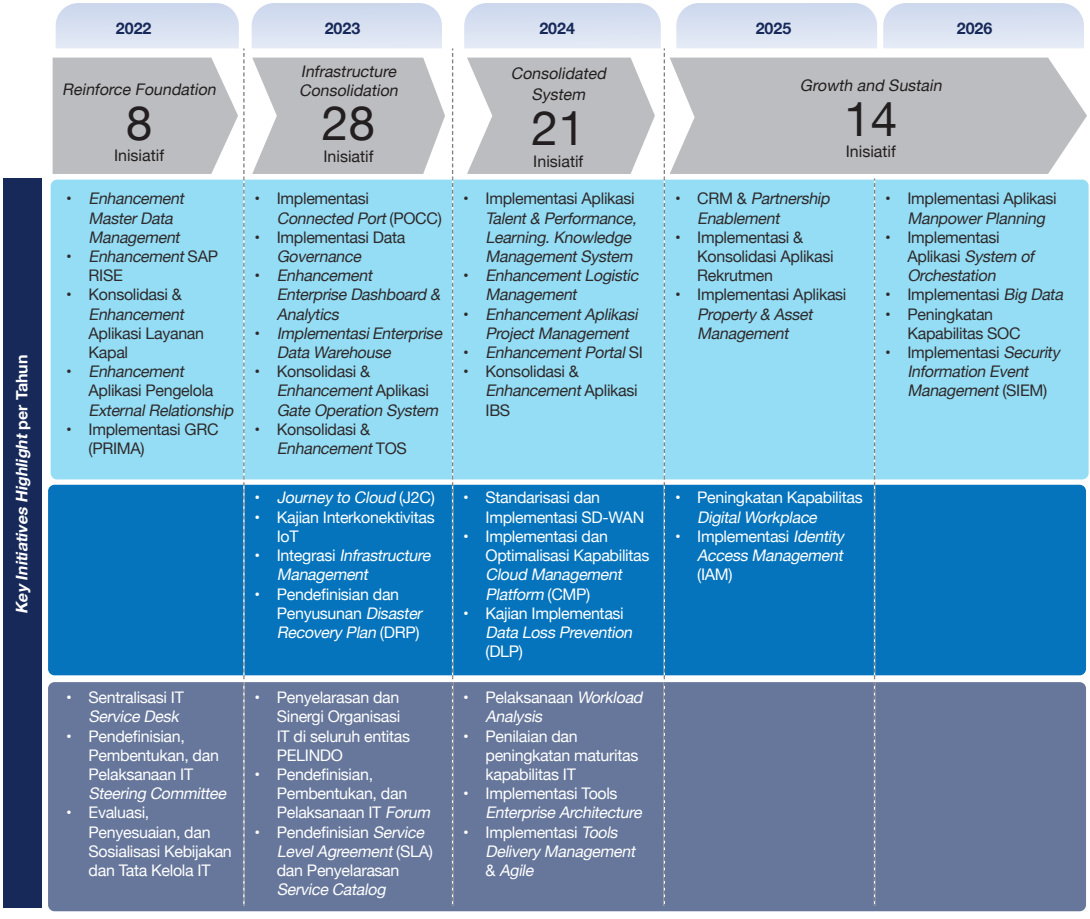

Dalam penyusunan Roadmap IT, beberapa inisiatif yang mendukung pengelolaan *sustainability* di Pelindo *Group* antara lain:

1. *Sistem Sustainability Data Management System* (SDMS)
2. Integrasi aplikasi SDMS dengan Aplikasi Perjalanan Dinas Pelindo *Group* untuk kebutuhan penghitungan Emisi Karbon yang digunakan pada saat perjalanan dinas oleh Pekerja Pelindo *Group*.

In developing the IT Roadmap, several initiatives supporting sustainability management at Pelindo Group include:

1. Sustainability Data Management System (SDMS).
2. Integration of the SDMS application with Pelindo Group Business Travel Application for calculating carbon emissions used during business travel by Pelindo Group employees.

TINGKAT MATURITAS TI

Tingkat kematangan tata kelola, proses, kebijakan, serta pengendalian TI dalam mendukung strategi bisnis mempengaruhi efektivitas penerapan prinsip keberlanjutan. Capaian IT *Maturity Level* pada IT Pelindo *Group* pada tahun 2025 adalah sebesar 3,11 dengan 19 proses prioritas IT Pelindo *Group* dengan target 3 untuk 19 proses tersebut.

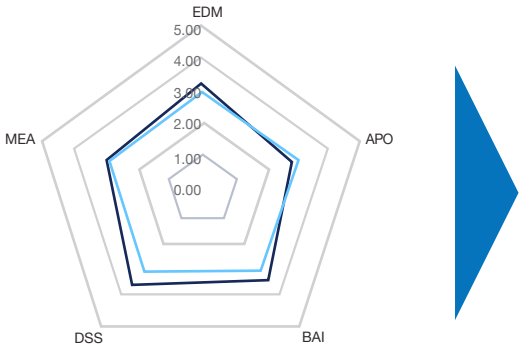

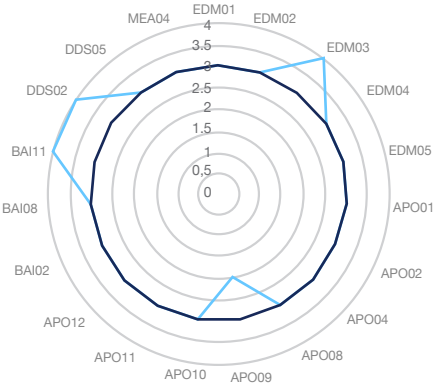

Capaian IT *maturity* pada level 3 menunjukkan pengelolaan IT pada Pelindo *Group* telah mencapai tahapan tata kelola TI sudah stabil, Risiko lebih terkendali serta Sudah siap naik ke tahap pengukuran kinerja berbasis data. Peningkatan tingkat kematangan pengelolaan TI menjadi fondasi penting dalam mendukung keberlanjutan perusahaan. Dengan proses, kontrol, dan pengukuran yang semakin matang, Perusahaan mampu mengelola risiko, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, serta menyediakan data yang andal untuk mendukung pengelolaan TI yang lebih efektif.

TINDAK LANJUT INDI 4.0

Implementasi INDI 4.0 yang diinisiasi oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia merupakan langkah strategis dalam mendorong transformasi industri nasional menuju era Revolusi Industri 4.0. Melalui pengukuran tingkat kesiapan industri berbasis lima pilar utama—Manajemen dan Organisasi, Orang dan Budaya, Produk dan Layanan, Teknologi, serta Operasi—INDI 4.0 menjadi instrumen penting dalam memetakan posisi dan kematangan transformasi digital perusahaan.

Hasil penilaian *Assessment* INDI 4.0 atas PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang diselenggarakan pada tahun 2022, didapati hasil sebagaimana berikut:

IT MATURITY LEVEL

The maturity level of IT governance, processes, policies, and controls in supporting business strategy influences the effectiveness of implementing sustainability principles. The IT Maturity Level achieved by Pelindo Group IT in 2025 is 3.11, with 19 priority processes, with a target of 3 for each of these 19 processes.

Achieving IT maturity level 3 indicates that Pelindo Group's IT management has reached a stable IT governance stage, with more manageable risks, and is ready to move to data-driven performance measurement. Increasing IT management maturity is a crucial foundation for supporting corporate sustainability. With increasingly mature processes, controls, and measurements, the company is able to manage risks, optimize technology utilization, and provide reliable data to support more effective IT management.

FOLLOW-UP TO INDI 4.0

The implementation of INDI 4.0, initiated by the Ministry of Industry of the Republic of Indonesia, is a strategic step in driving national industrial transformation towards the Industrial Revolution 4.0 era. By measuring the level of industrial readiness based on five main pillars—Management and Organization, People and Culture, Products and Services, Technology, and Operations—INDI 4.0 serves as a critical instrument for mapping the position and maturity of a company's digital transformation.

The INDI 4.0 assessment of PT Pelabuhan Indonesia (Persero), conducted in 2022, yielded the following results:

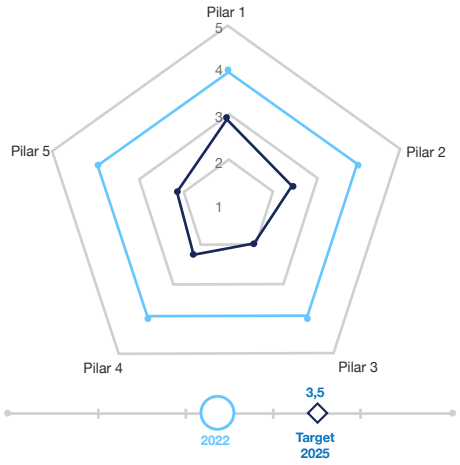

Opportunity for Improvement

Pilar 1	• Diperlukan evaluasi secara berkesinambungan untuk *roadmap* transformasi Perusahaan • Belum adanya analisa *impact business* serta monitoring atas *project* yang sudah dimplementasikan • Perlu dilakukan analisa *impact* atas investasi oleh pihak eksternal untuk melihat *cost value matrix* • Belum ada analisa terhadap impak bisnis dari implementasi inovasi baru dan evaluasi secara berkala oleh pihak internal perusahaan	• Diperlukan evaluasi secara berkesinambungan untuk roadmap transformasi Perusahaan • Belum adanya analisa impact business serta monitoring atas project yang sudah dimplementasikan • Perlu dilakukan analisa impact atas investasi oleh pihak eksternal untuk melihat cost value matrix • Belum ada analisa terhadap impak bisnis dari implementasi inovasi baru dan evaluasi secara berkala oleh pihak internal perusahaan
Pilar 2	• Perlu dilakukan pengukuran dari setiap implementasi teknologi baru • Perlu dilakukan *survey engagement* terkait adopsi dan pengembangan teknologi oleh pegawai • Perlu dilakukan analisa learning impact atas training dan pengembangan SDM yang telah dilaksanakan	• Perlu dilakukan pengukuran dari setiap implementasi teknologi baru • Perlu dilakukan survey engagement terkait adopsi dan pengembangan teknologi oleh pegawai • Perlu dilakukan analisa learning impact atas training dan pengembangan SDM yang telah dilaksanakan
Pilar 3	• Perlu ditambahkan kustomisasi produk yang menerapkan teknologi *Artificial Intelligence* dan/ atau otomasi (termasuk pengambilan keputusan secara otomatis)	• Perlu ditambahkan kustomisasi produk yang menerapkan teknologi Artificial Intelligence dan/ atau otomasi (termasuk pengambilan keputusan secara otomatis)
Pilar 4	• Pengelolaan *cyber security* harus termonitoring dalam unit OT. • Perlu penerapan *Decision Support System* dan evaluasi atas efektifitas manfaat dari mesin cerdas • Belum adanya bukti efektivitas dan manfaat dari aplikasi sistem teknologi yang mendukung digitalisasi	• Pengelolaan cyber security harus termonitoring dalam unit OT. • Perlu penerapan Decision Support System dan evaluasi atas efektifitas manfaat dari mesin cerdas • Belum adanya bukti efektivitas dan manfaat dari aplikasi sistem teknologi yang mendukung digitalisasi
Pilar 5	• Perlu dilakukan kajian atas penyimpanan dan *sharing data* • Perlu dikembangkan sistem rantai pasok dan proses otonom pada layanan IT serta sistem perawatan cerdas	• Perlu dilakukan kajian atas penyimpanan dan sharing data • Perlu dikembangkan sistem rantai pasok dan proses otonom pada layanan IT serta sistem perawatan cerdas

Adapun pada Tahun 2025, tindak lanjut dari pemenuhan Gap INDI 4.0 telah diselesaikan sebanyak 93% dengan rincian sebagai berikut:

1. Standarisasi dan digitalisasi ERP Pelindo *Group* (*Single* ERP);
2. Implementasi perangkat cerdas pada beberapa layanan Pelindo yang memanfaatkan teknologi mesin cerdas dan *Artificial Intelligence* (AI), sebagaimana berikut:
   a. Implementasi *dashboard analytics*;
   b. Implementasi *Robotics Process Automation* (RPA) pada beberapa layanan IT seperti otomasi pada proses verifikasi pembayaran;
   c. Implementasi teknologi *Optical Character Recognition* (OCR) untuk mendeteksi kerusakan *container* pada terminal;
   d. Implementasi *Chatbot* pada beberapa layanan IT yang berkaitan dengan pegawai, IT, dan Proses Pembayaran.
3. Implementasi teknologi *Cloud Management*;
4. Peningkatan kapabilitas sistem keamanan informasi yang mendukung implementasi teknologi digital.

By 2025, 93% of the follow-up to the INDI 4.0 Gap has been completed, as follows:

1. Standardization and digitalization of Pelindo Group's ERP (Single ERP);
2. Implementation of smart devices across several Pelindo services utilizing intelligent machine learning and Artificial Intelligence (AI), as follows:
   a. Implementation of dashboard analytics;
   b. Implementation of Robotics Process Automation (RPA) across several IT services, such as automation of the payment verification process;
   c. Implementation of Optical Character Recognition (OCR) technology to detect container damage at terminals;
   d. Implementation of Chatbots across several IT services related to employees, IT, and the Payment Process.
3. Implementation of Cloud Management technology;
4. Enhancement of information security system capabilities to support the implementation of digital technology.

TATA KELOLA KEAMANAN INFORMASI

Perusahaan menerapkan Kebijakan Keamanan Informasi untuk menjamin keberlangsungan layanan operasional perusahaan. Penerapan kebijakan mengacu pada standar dan kerangka kerja internasional, yaitu ISO/IEC 27001 Sistem Manajemen Keamanan Informasi, *National Institute of Standards and Technology* (NIST), dan *Computer for Information Service* (CIS) *Control*. Implementasi dilakukan melalui pengelolaan risiko keamanan informasi, peningkatan sistem keamanan informasi dan perangkat teknologi informasi yang mendukung proses bisnis krusial Perusahaan. Upaya tersebut bertujuan untuk memastikan

INFORMATION SECURITY GOVERNANCE

The Company implements an Information Security Policy to ensure the continuity of its operational services. The policy's implementation is based on international standards and frameworks, including ISO/IEC 27001 Information Security Management System, the National Institute of Standards and Technology (NIST), and Computer for Information Services (CIS) Control. Implementation is carried out through information security risk management and improvements to information security systems and information technology devices that support the Company's critical business processes. These efforts aim

operasional perusahaan berjalan secara aman, andal, dan berkelanjutan.

Selain itu, terdapat penyampaian manajemen risiko IT yang disampaikan pada Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi. Pada rapat tersebut, Perseroan telah mengidentifikasi risiko utama terkait teknologi informasi, termasuk gangguan sistem, keamanan siber, dan pemulihan bencana, untuk memastikan bahwa risiko tersebut dikelola dan diintegrasikan ke dalam kerangka manajemen risiko secara keseluruhan.

to ensure the Company's operations are secure, reliable, and sustainable.

In addition, a presentation on IT risk management was presented at the Joint Meeting of Board of Commissioners and Board of Directors. At the meeting, the Company identified key risks related to information technology, including system disruptions, cybersecurity, and disaster recovery, to ensure they are managed and integrated into the overall risk management framework.

Tata Kelola Keamanan Informasi
XXXXX

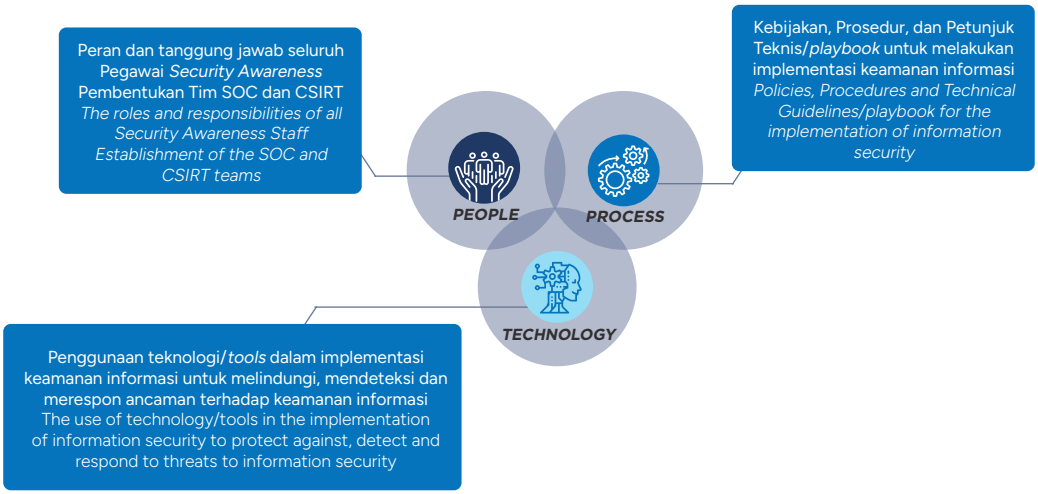

MATURITAS KEAMANAN INFORMASI

Perusahaan telah memperoleh hasil pengukuran indeks Tingkat kematangan keamanan informasi yang diverifikasi oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Pengukuran ini dilakukan untuk menilai kesiapan, efektivitas, dan konsistensi penerapan tata kelola keamanan informasi perusahaan dalam melindungi aset informasi strategis serta sistem teknologi informasi yang bertujuan untuk mendukung operasional Pelabuhan dengan total *score* indeks Kematangan 4.13 (Level 4) dari skala 5. Hasil indeks tersebut mencerminkan bahwa penerapan keamanan informasi di Pelindo telah berjalan secara terstruktur dan berkelanjutan, serta mendukung penguatan tata kelola perusahaan, ketahanan siber, dan keberlangsungan layanan operasional Perusahaan.

INFORMATION SECURITY MATURITY

The Company has received an Information Security Maturity Index measurement result verified by the National Cyber and Crypto Agency (BSSN). This measurement was conducted to assess the readiness, effectiveness, and consistency of the company's information security governance implementation in protecting strategic information assets and information technology systems aimed at supporting port operations. The total Maturity Index score was 4.13 (Level 4) on a scale of 5. This index result reflects that Pelindo's information security implementation is structured and sustainable, and supports the strengthening of corporate governance, cyber resilience, and the continuity of the Company's

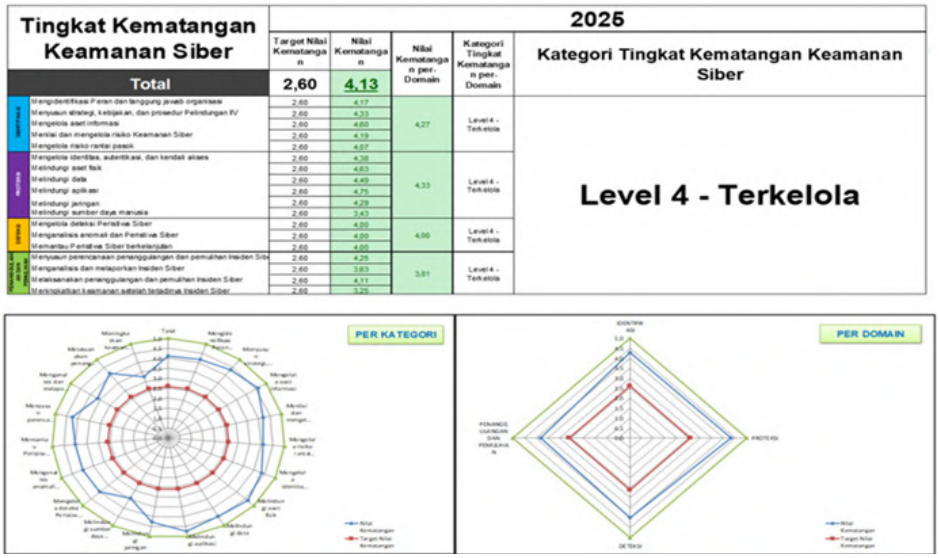

ROADMAP PENINGKATAN KAPABILITAS KEAMANAN INFORMASI

Roadmap peningkatan kapabilitas keamanan informasi Perusahaan dilaksanakan secara bertahap hingga sampai dengan tahun 2026 dalam rangka meningkatkan ketersediaan layanan IT. Pada tahun 2024, Perusahaan membangun fondasi keamanan informasi melalui penguatan fungsi keamanan (SOC/CSIRT), penyusunan dan penerapan kebijakan, peningkatan kesadaran keamanan informasi (*security awareness*). Selanjutnya, pada tahun 2025, Perusahaan melakukan penguatan keamanan infrastruktur teknologi informasi, serta penerapan berbagai kontrol keamanan utama seperti SIEM, EDR, MFA, WAF dan PAM. Pada tahun 2026, Perusahaan menargetkan penguatan pengoperasian *Security Operations Center* (SOC) dengan meningkatkan kapabilitas respons insiden, pelaksanaan *Vulnerability Assessment and Penetration Testing* (VAPT).

INFORMATION SECURITY CAPABILITY ENHANCEMENT ROADMAP

The Company's roadmap for enhancing information security capabilities is implemented in stages through 2026 to improve the availability of IT services. In 2024, the Company established the foundation of information security by strengthening security functions (SOC/CSIRT), developing and implementing policies, and increasing information security awareness. In 2025, the Company strengthened IT infrastructure security and implemented key security controls such as SIEM, EDR, MFA, WAF, and PAM. In 2026, the Company targets further enhancement of Security Operations Center (SOC) operations by improving incident response capabilities and conducting Vulnerability Assessment and Penetration Testing (VAPT).

TATA KELOLA DATA

Pengelolaan data di Pelindo mengadopsi *best-practice framework* DAMA-DMBOK (*Data Management Body of Knowledge*) yang mengatur 12 *Knowledge Area* terkait pengelolaan data yang dituangkan dalam Kebijakan Tata Kelola Data, standar, dan juga prosedur kerja.

1. ***Data Analytics***
   Pengembangan Data Analytics mengadopsi standar *Cross-Industry Standard Process for Data Mining* (CRISP-DM), disesuaikan dengan standar proses *Software Development Lifecycle* (SDLC) yang berlaku di Pelindo. Berikut ini pemetaan antara proses CRISP-DM dan tahapan pada SDLC *Waterfall* dan *Agile*.

DATA GOVERNANCE

Data management at Pelindo adopts DAMA-DMBOK (Data Management Body of Knowledge) best-practice framework, which governs 12 knowledge areas related to data management, as outlined in Data Governance Policies, standards, and operational procedures.

1. **Data Analytics**
   The development of Data Analytics adopts the Cross-Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM), aligned with the Software Development Lifecycle (SDLC) standards applied at Pelindo. The mapping between CRISP-DM processes and SDLC stages (Waterfall and Agile) has been established.

2. ***Data Architecture & Metadata Model***
   Enterprise Data Model atau EDM merupakan sebuah arsitektur yang menggambarkan data yang saling terintegrasi yang menggambarkan struktur, hubungan dan semantik data di berbagai fungsi dan proses bisnis didalam Perusahaan. Terdapat 23 Data Domain di Pelindo yang dikelompokkan berdasarkan Area Bisnis yang mengacu kepada *Business Enterprise Architecture*.

PELINDUNGAN DATA PRIBADI (PDP)

Pemerintah Indonesia telah menerapkan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi untuk dapat mengatur data pribadi masyarakat Indonesia. Dalam menjalankan usahanya, Pelindo menyimpan dan mengelola Data Pribadi yang bersifat sensitif, sehingga Pelindo juga perlu menerapkan Pelindungan Data Pribadi (PDP). Komitmen manajemen atas pelaksanaan PDP terwujud dalam pengesahan Peraturan Direksi terkait Kebijakan Pelindungan Data Pribadi di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tahun 2025 (Nomor Perdir HK.01/17/9/3/PKDT/UTMA/PLND-25).

Untuk menciptakan implementasi Pelindungan Data Pribadi yang holistik di Pelindo, telah disusun program terkait PDP yang kemudian diturunkan menjadi beberapa inisiatif:

1. **Pemenuhan standar kebijakan Pelindungan Data Pribadi**
   Program yang berfokus pada pemenuhan dokumen pendukung implementasi PDP melalui kebijakan, prosedur, dan turunannya sebagai acuan pelaksanaan PDP di Pelindo. Program ini diturunkan menjadi inisiatif berikut:
   a. Penyusunan dan pengesahan Peraturan Direksi Kebijakan Pelindungan Data Pribadi;
   b. Penurunan prosedur, pedoman, dan standar terkait pengelolaan Data Pribadi Digital Terstruktur di *Group* Teknologi Informasi;
   c. Sosialisasi usulan pembaharuan prosedur yang terkait dengan pengelolaan Data Pribadi di Departemen lainnya, serta penetapan sanksi indisipliner untuk pelanggaran dalam pengelolaan Data Pribadi di internal Perusahaan;
   d. Pelaksanaan penilaian implementasi PDP dalam asesmen tata kelola data.
2. **Pengembangan kapabilitas SDM pendukung dan awareness terkait Pelindungan Data Pribadi**

   Program kerja yang berfokus pada pengembangan kapabilitas SDM sebagai penggerak implementasi PDP. Program ini diturunkan menjadi inisiatif berikut:

   a. Penunjukan dan pengembangan kapabilitas *Data Protection Officer*;

2. **Data Architecture & Metadata Model**
   The Enterprise Data Model (EDM) is an architecture that describes integrated data, including structure, relationships, and semantics across various functions and business processes within the Company. There are 23 data domains at Pelindo, grouped based on Business Areas in reference to the Business Enterprise Architecture.

PERSONAL DATA PROTECTION (PDP)

The Government of Indonesia has enacted Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection to regulate the personal data of Indonesian citizens. In conducting its business, Pelindo stores and manages sensitive personal data; therefore, the Company implements Personal Data Protection (PDP). Management's commitment to PDP implementation is reflected in the issuance of a Board of Directors Regulation regarding Personal Data Protection Policy within PT Pelabuhan Indonesia (Persero) in 2025 (Regulation Number Perdir HK.01/17/9/3/PKDT/UTMA/PLND-25).

To ensure a holistic implementation of Personal Data Protection, Pelindo has established a PDP program that is translated into several initiatives:

1. **Compliance with Personal Data Protection policy standards**
   A program focused on fulfilling supporting documents for PDP implementation through policies, procedures, and their derivatives as references for PDP implementation at Pelindo. This program includes the following initiatives:
   a. Drafting and ratification of the Board of Directors Regulation on Personal Data Protection Policy;
   b. Development of procedures, guidelines, and standards for managing structured digital personal data within the Information Technology Group;
   c. Socialization of proposed updates to procedures related to personal data management in other departments, as well as the establishment of disciplinary sanctions for violations of personal data management within the Company;
   d. Conducting assessments of PDP implementation as part of data governance evaluations.
2. **Development of supporting human resource capabilities and awareness of Personal Data Protection**
   A work program focused on developing human resource capabilities as the driving force behind PDP implementation. This program includes the following initiatives:
   a. Appointment and capability development of a Data Protection Officer;

b. Pengembangan konten pelatihan dan *campaign awareness* PDP;
c. Pelaksanaan *workshop* pelatihan Pelindungan Data Pribadi.

3. **Implementasi teknologi pendukung Pelindungan Data Pribadi**
   Program kerja yang berfokus pada peningkatan teknologi digital dan sistem untuk mendukung seluruh aktivitas PDP di Pelindo. Program ini diturunkan menjadi inisiatif berikut:
   a. Pengembangan kapabilitas *consent management* PDP dalam aplikasi terkait;
   b. Implementasi teknologi *Data Loss Prevention* (DLP) untuk Data Pribadi Digital Terstruktur;
   c. Implementasi teknologi *data masking* untuk proteksi Data Pribadi Digital Terstruktur.

ENTERPRISE ARCHITECTURE

Enterprise Architecture Operating Model (EA *Operating Model*) merupakan kerangka kerja yang mendefinisikan bagaimana fungsi Arsitektur *Enterprise* dijalankan, dikelola, dan diintegrasikan ke dalam organisasi untuk mendukung strategi bisnis. Terdapat beberapa jenis EA *Operating Model* yang diterapkan perusahaan, yakni Desentralisasi, *Hub and Spoke*, serta Sentralisasi. Masing-masing model diterapkan sesuai dengan kebutuhan strategis bisnis perusahaan. Model Operasi EA yang ada pada Pelindo sebelumnya bersifat Desentralisasi, namun dalam rangka standardisasi sistem baik yang mendukung operasional maupun *backoffice* dibutuhkan penyelarasan *Enterprise Architecture* sehingga saat ini EA *Operating Model* yang diterapkan bersifat Sentralisasi.

Architecture Review Board memastikan bahwa pengembangan dan perubahan arsitektur perusahaan sesuai dengan tujuan perusahaan dan mematuhi standar yang ada. *Architecture Review Board* juga memastikan bahwa pengembangan dan perubahan arsitektur perusahaan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis, serta sesuai dengan kapabilitas perusahaan. *Architecture Review Board* dilakukan secara periodik sesuai dengan kebutuhan bisnis. *Architecture Review Board* akan melakukan diskusi yang berkaitan dengan:

1. Penyusunan dan pemutakhiran *Enterprise Architecture* untuk memastikan keselarasan dengan strategi TI dan tujuan bisnis Perusahaan;
2. Pembahasan standar teknologi yang harus diadopsi dalam implementasi proyek-proyek TI untuk menjaga konsistensi dan kualitas;
3. Tindak lanjut dari rekomendasi atau keputusan yang dibuat oleh IT *Steering Committee* terkait kebijakan atau inisiatif TI;
4. Diskusi tentang risiko dan masalah yang terkait dengan pengelolaan arsitektur informasi dan sistem, serta penyusunan strategi mitigasi yang diperlukan.

b. Development of training materials and PDP awareness campaigns;
c. Conducting Personal Data Protection training workshops.

3. **Implementation of supporting technologies for Personal Data Protection**
   A work program focused on enhancing digital technology and systems to support all PDP activities at Pelindo. This program includes the following initiatives:
   a. Development of consent management capabilities in relevant applications;
   b. Implementation of Data Loss Prevention (DLP) technology for structured digital personal data;
   c. Implementation of data masking technology to protect structured digital personal data.

ENTERPRISE ARCHITECTURE

The Enterprise Architecture Operating Model (EA Operating Model) is a framework that defines how the Enterprise Architecture function is executed, managed, and integrated within the organization to support business strategy. Several types of EA Operating Models are applied by the Company, namely Decentralized, Hub and Spoke, and Centralized models, each implemented according to business strategic needs. Previously, the EA Operating Model at Pelindo was decentralized; however, to standardize systems supporting both operational and back-office functions, alignment of Enterprise Architecture is required. Therefore, the current EA Operating Model applied is centralized.

The Architecture Review Board ensures that the development and changes in the Company's architecture align with corporate objectives and comply with established standards. It also ensures that such developments improve the efficiency and effectiveness of business processes and are aligned with the Company's capabilities. The Architecture Review Board is conducted periodically based on business needs and discusses the following:

1. Development and updating of Enterprise Architecture to ensure alignment with IT strategy and business objectives;
2. Discussion of technology standards to be adopted in IT project implementation to maintain consistency and quality;
3. Follow-up on recommendations or decisions made by the IT Steering Committee related to IT policies or initiatives;
4. Discussion of risks and issues related to the management of information architecture and systems, along with the development of necessary mitigation strategies.

Struktur Pengelola Teknologi Informasi
Information Technology Management Structure

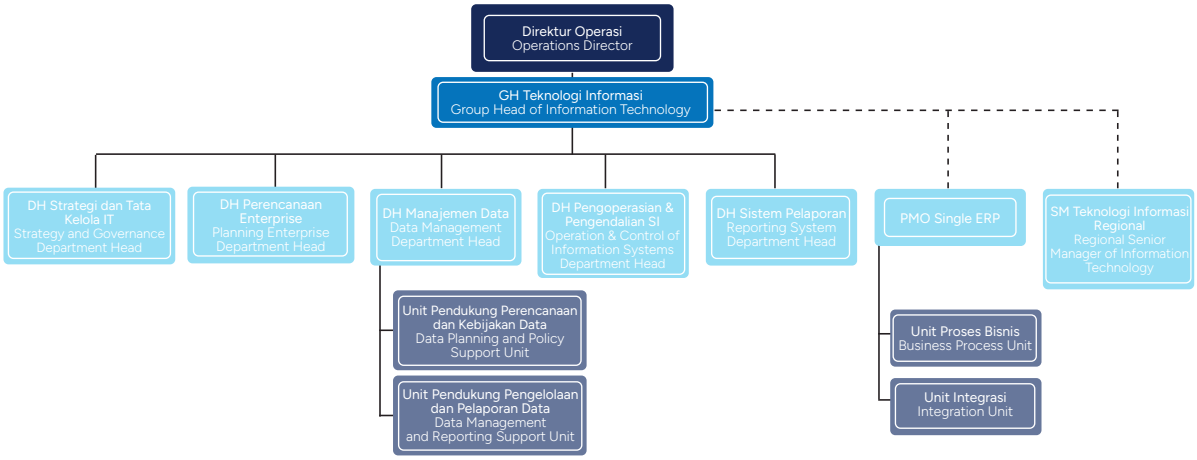

Berdasarkan bagan organisasi tersebut, *Group* Teknologi Informasi berada di bawah koordinasi Direktorat Operasi dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Operasi dalam perencanaan, pengelolaan, serta pengendalian fungsi teknologi informasi Perusahaan.

Secara struktur organisasi, *Group* Teknologi Informasi terdiri dari 5 (lima) departemen utama, yaitu:
1. Departemen Strategi dan Tata Kelola TI (STKI);
2. Departemen Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi (PPSI);
3. Departemen Manajemen Data (MNDT);
4. Departemen Perencanaan *Enterprise* (PERP);
5. Departemen Pelaporan (SPLP).

Masing-masing departemen dipimpin oleh pejabat struktural setingkat Department Head yang memiliki peran dan tanggung jawab sesuai dengan ruang lingkup fungsi organisasinya.

Based on the organizational chart, the Information Technology Group is under the coordination of the Director of Operations and is directly responsible to the Director of Operations for planning, managing, and controlling the Company's information technology functions.

Structurally, the Information Technology Group consists of five main departments:
1. IT Strategy and Governance Department (STKI);
2. Information Systems Planning and Development Department (PPSI);
3. Data Management Department (MNDT);
4. Enterprise Planning Department (PERP);
5. Reporting Department (SPLP).

Each department is led by a structural official at the Department Head level who has roles and responsibilities according to the scope of their organizational functions.

GROUP HEAD TEKNOLOGI INFORMASI

Berperan dalam mengevaluasi, mengelola dan merekomendasikan penyusunan program kerja meliputi bidang strategi dan tata kelola TI, pengoperasian dan pengendalian sistem informasi, manajemen data, perencanaan enterprise, dan sistem pelaporan dalam rangka memastikan pencapaian visi dan misi Perusahaan dan aspirasi pemegang saham. Selain itu, *Group Head* Teknologi Informasi mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain:
1. Merumuskan, menetapkan dan *memonitoring* rencana program dan anggaran kerja di *group* teknologi informasi;
2. Mereviu, mengoordinasikan, dan mengevaluasi kebijakan dan prosedur terkait sistem informasi;

INFORMATION TECHNOLOGY GROUP HEAD

Plays a role in evaluating, managing, and recommending the development of work programs covering IT strategy and governance, information systems operations and control, data management, enterprise planning, and reporting systems to ensure the achievement of the Company's vision and mission and the aspirations of shareholders. In addition, the Group Head of Information Technology has the following duties and responsibilities:

1. Formulating, establishing, and monitoring work program plans and budgets in the information technology group;
2. Reviewing, coordinating, and evaluating policies and procedures related to information systems;

3. Melakukan reviu terhadap usulan IT *masterplan*, IT *governance*, kebijakan pengelolaan risiko IT, kebijakan keamanan IT, dan kebijakan tata kelola IT untuk rencana pengembangan sistem informasi baik *software* ataupun *hardware*.

Department Head Strategi dan Tata kelola TI bertugas merumuskan, mengembangkan, dan memastikan program kerja yang berkaitan dengan strategi dan tata kelola TI untuk memastikan pencapaian visi dan misi Perusahaan dan aspirasi pemegang saham.

Department Head Pengoperasian dan Pengendalian Sistem Informasi merumuskan,mengembangkan dan memastikan penyusunan program kerja yang berkaitan dengan pengoperasian dan pengendalian sistem informasi untuk memastikan pencapaian visi dan misi Perusahaan dan aspirasi pemegang saham.

Department Head Manajemen Data Merumuskan, mengembangkan dan memastikan penyusunan program kerja yang berkaitan dengan manajemen data dalam rangka mendukung operasionalisasi dan pencapaian tujuan Perusahaan.

Manager Perencanaan dan Kebijakan Data Mengidentifikasi/mengusulkan, memastikan serta menjalankan kegiatan perencanaan dan kebijakan data dalam rangka mendukung pencapaian target departemen manajemen data.

Manager Pengolahan dan Pelaporan Data Mengidentifikasi/mengusulkan, memastikan kegiatan Pengolahan dan pelaporan data dalam rangka mendukung operasionalisasi dan pencapaian tujuan Perusahaan untuk memastikan pencapaian visi dan misi Perusahaan dan aspirasi pemegang saham.

Department Head Perencanaan *Enterprise* Merumuskan, mengembangkan dan memastikan program kerja yang berkaitan dengan desain, solusi, dan tata kelola *enterprise architecture* untuk memastikan pencapaian visi dan misi Perusahaan dan aspirasi pemegang saham.

Department Head Sistem Pelaporan Merumuskan perencanaan program kerja sistem pelaporan pelabuhan dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja Perusahaan.

PMO *SINGLE* ERP

1. Manager Pendukung Proses Bisnis
   a. Memastikan *blueprint* yang digunakan sebagai dasar pembangunan ERP telah sesuai dan disetujui oleh BPO.
   b. Melakukan *review blueprint* terhadap setiap permintaan perubahan.
   c. Melakukan analisa terhadap kebutuhan bisnis terhadap pengembangan aplikasi.

3. Reviewing proposed IT master plans, IT governance, IT risk management policies, IT security policies, and IT governance policies for information systems development plans, both software and hardware.

The Department Head of IT Strategy and Governance is responsible for formulating, developing, and ensuring work programs related to IT strategy and governance to ensure the achievement of the Company's vision and mission and shareholder aspirations.

The Department Head of Information Systems Operations and Control formulates, develops, and ensures the development of work programs related to the operation and control of information systems to ensure the achievement of the Company's vision and mission and shareholder aspirations.

The Department Head of Data Management formulates, develops, and ensures the development of work programs related to data management to support the operationalization and achievement of Company goals.

Data Planning and Policy Manager: Identifies/proposes, ensures, and implements data planning and policy activities to support the achievement of data management department targets.

Data Processing and Reporting Manager: Identifies/proposes, and ensures data processing and reporting activities to support the operationalization and achievement of Company objectives, ensuring the achievement of the Company's vision and mission and the aspirations of shareholders.

Department Head: Enterprise Planning: Formulates, develops, and ensures work programs related to enterprise architecture design, solutions, and governance to ensure the achievement of the Company's vision and mission and the aspirations of shareholders.

Department Head: Reporting System: Formulates work program planning for the port reporting system to support the achievement of Company performance targets.

SINGLE ERP PMO

1. Business Process Support Manager
   a. Ensures the blueprint used as the basis for ERP development is compliant and approved by the BPO.
   b. Reviews the blueprint for each change request.
   c. Analyzes business needs for application development.

d. Membuat rencana pemenuhan perubahan terkait dengan standarisasi proses bisnis dan implementasi *single* ERP Pelindo *Group*.
e. Melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap implementasi *single* ERP.
f. Melakukan pembuatan skeanario pengujian terhadap setiap aktivitas testing oleh implementor ERP.

2. *Manager* Pendukung Integrasi
a. Menyusun tata kelola IT untuk menangani perubahan perilaku atas implementasi ERP.
b. Pemetaan kondisi infrastruktur yang dimiliki saat ini.
c. Menyusun usulan dan dokumen perbaikan infrastruktur.
d. Menyusun *point to point integration* antara ERP dengan aplikasi non ERP.
e. Melakukan pembuatan skeanario pengujian terhadap setiap aktivitas testing oleh implementor ERP.
f. Melakukan *supervise* terhadap proses integrase ERP dengan aplikasi *surrounding*.
g. Melakukan pengelolaan *role management*.
h. Memberikan *support* terhadap *user* atas penggunaan aplikasi ERP.

d. Develops change fulfillment plans related to business process standardization and the implementation of Pelindo Group's single ERP.
e. Coordinate and supervise the implementation of a single ERP system.
f. Create test scenarios for each testing activity by the ERP implementer.

2. Integration Support Manager
a. Develop IT governance to handle behavioral changes related to ERP implementation.
b. Map the current infrastructure conditions.
c. Develop infrastructure improvement proposals and documents.
d. Develop point-to-point integration between ERP and non-ERP applications.
e. Create test scenarios for each testing activity by the ERP implementer.
f. Supervise the integration process between ERP and surrounding applications.
g. Manage role management.
h. Provide support to users in using the ERP application.

Rencana Kerja Teknologi Informasi 2026
2026 Information Technology Work Plan

Pada tahun 2026, *Group* Teknologi Informasi telah merencanakan pengembangan sistem informasi yang dituangkan dalam Rencana Kerja Manajemen (RKM) Bidang Teknologi Informasi, dengan rincian program sebagai berikut:

1. Integrasi *Cloud Environment* dengan Virtualisasi Server Pada Data Center Pelindo;
2. Peningkatan Infrastruktur Teknologi Informasi dan *Cyber Security*;
3. Pengembangan Pelindo Hub untuk *Digital Maritime Solution*;
4. Penguatan Fungsi *Enterprise Architecture*;
5. Implementasi *Data Digital Strategy*;
6. Penyusunan IT *Master Plan* Periode 2027-2031;
7. Pengembangan Visualisasi *Data Analytics* dan *Data Platform*;
8. Pengembangan Aplikasi ERP;
9. Pengembangan Aplikasi TOS;
10. Integrasi Data Kinerja Operasional.

Selain RKM di atas, *Group* Teknologi Informasi juga menjadi *support* terhadap RKM *Group* lainnya di Kantor Pusat, yang terkait dengan pengembangan sistem dan infrastruktur di Pelindo.

In 2026, the Information Technology Group has planned information system development as outlined in the Information Technology Management Work Plan (RKM), with the following program details:

1. Integration of Cloud Environment with Server Virtualization at Pelindo's Data Center;
2. Improvement of Information Technology Infrastructure and Cybersecurity;
3. Development of Pelindo Hub for Digital Maritime Solutions;
4. Strengthening the Enterprise Architecture Function;
5. Implementation of Data Digital Strategy;
6. Preparation of IT Master Plan for 2027-2031 Period;
7. Development of Data Analytics Visualization and Data Platform;
8. Development of ERP Applications;
9. Development of TOS Applications;
10. Integration of Operational Performance Data.

In addition to the RKM above, the Information Technology Group also supports other RKM Groups at Head Office, related to the development of Pelindo's systems and infrastructure.

PELINDO
INDONESIA MARITIME GATEWAY

Analisis dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perseroan

Management's Discussion and Analysis of The Company's Performance

Tinjauan Perekonomian
Economic Review

ANALISIS PEREKONOMIAN GLOBAL

Setelah perjuangan panjang melawan inflasi pada tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2025 mayoritas bank sentral utama berhasil mencapai pendaratan ekonomi yang mulus (*soft landing*). Pertumbuhan PDB global pada tahun 2025 stabil 3,3%. Inflasi mulai menjinak mendekati target 2%, yang memungkinkan pelonggaran kebijakan moneter secara bertahap. Namun, pertumbuhan ini tidak merata. Sementara Amerika Serikat tetap kuat berkat konsumsi domestik, Eropa masih berjuang dengan biaya energi yang fluktuatif, dan China terus bertransisi dari model pertumbuhan berbasis properti menuju manufaktur teknologi tinggi.

Lebih jauh, tahun 2025 ditandai oleh pengenaan tarif oleh Amerika Serikat dalam jumlah relatif signifikan terhadap hampir semua partner perdagangan negara tersebut. Sampai dengan Triwulan IV tahun 2025, rate efektif tarif Amerika Serikat masih tetap tinggi di level 19% dan ketegangan dalam perdagangan internasional masih mendominasi hubungan perdagangan antara AS dengan Cina dan partner utama perdagangan AS seperti Kanada dan Mexico.

Meskipun demikian, tahun 2025 perdagangan internasional tercatat tumbuh lebih pesat apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi global. Hal tersebut merefleksikan perbaruan momentum dalam perdagangan lintas negara. Volume perdagangan global diproyeksikan melampaui nilai USDD35 triliun, atau meningkat lebih dari USD2,2 triliun atau 7% dibandingkan dengan tahun 2024 (UNCTAD Global Trade Update, Desember 2025)

Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat pada tahun 2025 berada dalam fase konsolidasi struktural. Amerika Serikat mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 2,1%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi di negara Uni Eropa yang tercatat sebesar 1,4% yang merupakan dampak tantangan yang harus dihadapi terkait kontraksi perdagangan global yang dipengaruhi oleh pengenaan tarif oleh Amerika Serikat.

Sementara itu, Cina sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar dunia mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,0% didorong oleh pertumbuhan yang kuat di sektor manufaktur dan ekspor, terutama untuk kendaraan listrik dan energi surya. Angka ini tercatat mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024 yang tercatat

GLOBAL ECONOMIC ANALYSIS

After a long struggle against inflation in previous years, by 2025, most major central banks achieved a soft economic landing. Global GDP growth in 2025 stabilized at 3.3%. Inflation began to subside, approaching the 2% target, allowing for gradual monetary policy easing. However, this growth was uneven, whilst the United States remained strong thanks to domestic consumption, Europe still struggled with volatile energy costs, and China continued its transition from a property-based growth model to high-tech manufacturing.

Also, 2025 was marked by the imposition of relatively significant tariffs by the United States on nearly all of its trading partners. Until QIV 2025, the effective US tariff rate remained high at 19%, and international trade tensions continued to dominate trade relations between the US and China and key US trading partners, such as Canada and Mexico.

Nevertheless, international trade was projected to grow faster than global economic growth in 2025, reflecting renewed momentum in cross-border trade. Global trade volume was projected to exceed USD 35 trillion, representing an increase of more than USD 2.2 trillion, or 7%, compared to 2024 (UNCTAD Global Trade Update, December 2025).

The United States' economic growth in 2025 was in a phase of structural consolidation, and they recorded economic growth of 2.1%, higher than the average economic growth in the European Union (EU) of 1.4%. This reflected the challenges faced by the contraction in global trade due to the imposition of tariffs by the United States.

While, China, as one of the world's largest economies, recorded economic growth of 5.0%, driven by strong growth in the manufacturing and export sectors, particularly for electric vehicles and solar energy. This figure represents an increase compared to the 4.8% growth forecast for 2024. While still positive, China faced significant pressure

sebesar 4,8%. Meskipun masih menunjukkan angka positif, Cina menghadapi tekanan besar untuk mempertahankan laju pertumbuhannya di tengah persaingan global yang semakin ketat dan perubahan dalam kebijakan domestik serta global.

to maintain its growth rate amid intensifying global competition and shifts in domestic and global policies.

Tabel Rincian Proyeksi Ekonomi
Economic Projection Details

(dalam %)
(in %)

	Estimate	Projections	
(Real GDP, annual percent change)	**2025**	**2026**	**2027**
World Output	**3.3**	**3.3**	**3.2**
Advanced Economies	**1.7**	**1.8**	**1.7**
United States	2.1	2.4	2.0
Euro Area	1.4	1.3	1.4
Germany	0.2	1.1	1.5
France	0.8	1.0	1.2
Italy	0.5	0.7	0.7
Spain	2.9	2.3	1.9
Japan	1.1	0.7	0.6
United Kingdom	1.4	1.3	1.5
Canada	1.6	1.6	1.9
Other Advanced Economies	1.8	2.0	2.1
Emerging Market and Developing Economies	**4.4**	**4.2**	**4.1**
Emerging and Developing Asia	5.4	5.0	4.8
China	5.0	4.5	4.0
India	7.3	6.4	6.4
Emerging and Developing Europe	2.0	2.3	2.4
Russia	0.6	0.8	1.0
Latin America and the Caribbean	2.4	2.2	2.7
Brazil	2.5	1.6	2.3
Mexico	0.6	1.5	2.1
Middle East and Central Asia	3.7	3.9	4.0
Saudi Arabia	4.3	4.5	3.6
Sub-Saharan Africa	4.4	4.6	4.6
Nigeria	4.2	4.4	4.1
South Africa	1.3	1.4	1.5
Memorandum			
Emerging Market and Middle-Income Economies	4.3	4.1	4.1
Low-Income Developing Countries	4.6	5.1	5.1

Analisis Perekonomian Nasional
National Economic Analysis

Perekonomian Indonesia di tahun 2025 tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 5,11%, atau lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tahun 2024 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,03%. Dari sisi produksi, lapangan usaha jasa lainnya mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 9,93%, sedangkan dari sisi pengeluaran, komponen ekspor barang dan jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 7,03%. Pertumbuhan tersebut terjadi pada hampir semua lapangan usaha, kecuali penggalian dan pertambangan yang terkontraksi sebesar 0,66%.

The Indonesian economy was projected to grow by 5.11% in 2025, exceeding the 5.03% growth achieved in 2024. In terms of production, other services businesses experienced the highest growth of 9.93%, while in terms of expenditure, exports of goods and services experienced the highest growth of 7.03%. This growth occurred in almost all business sectors, except for quarrying and mining, which contracted by 0.66%.

Grafik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Indonesia's Economic Growth

(dalam %)
(in %)

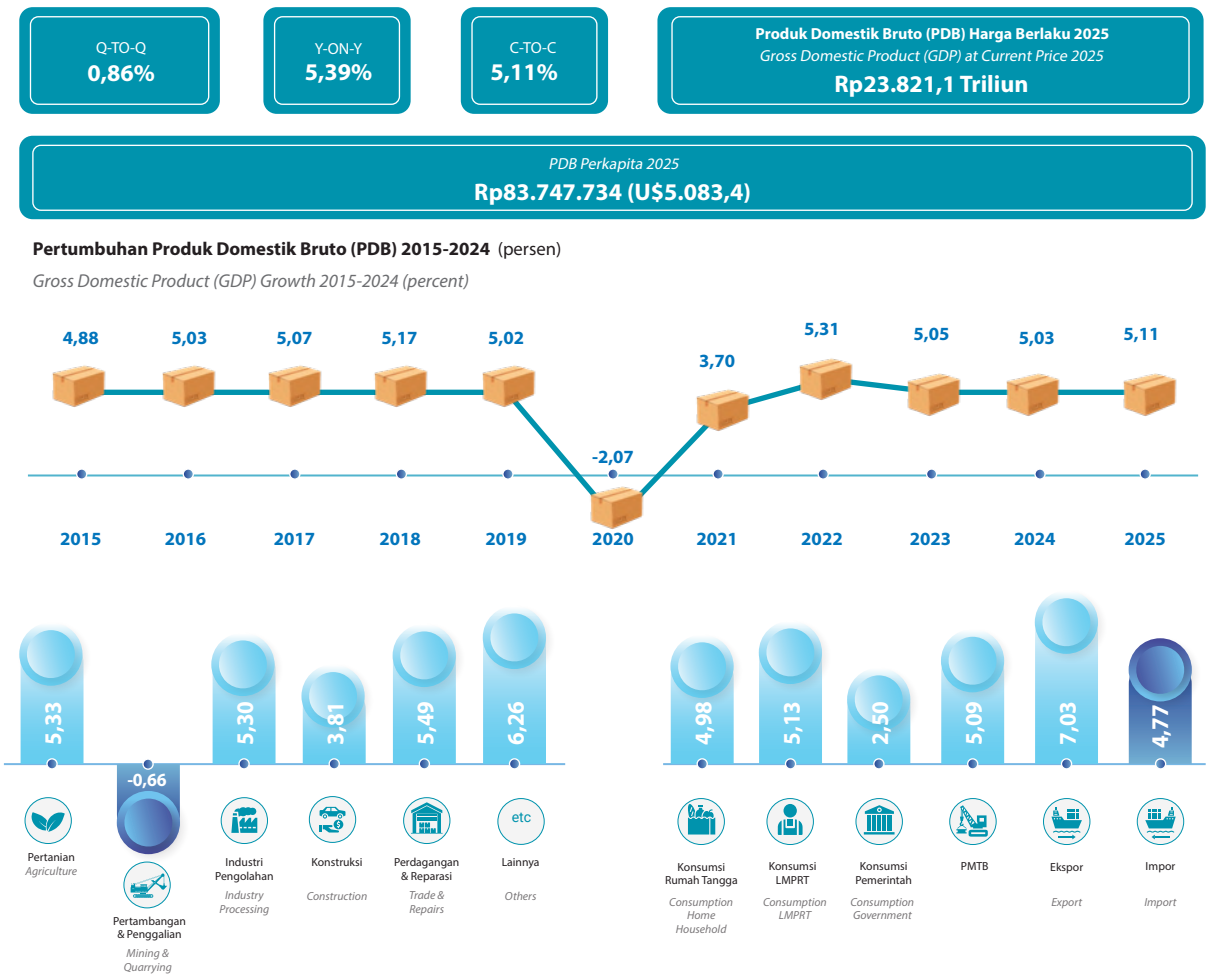

Sumber: Berita Resmi Statistik No. 18/02/Th. XXIXI, Badan Pusat Statistik, 5 Februari 2026
Source: Official Statistics News No. 18/02/Year XXVIII, Central Statistics Agency, February 5, 2026

Inflasi Indonesia pada tahun 2025 mencatatkan tingkat inflasi yang masih cukup baik, dengan nilai inflasi sebesar 2,92% (yoy). Capaian tersebut menunjukkan inflasi masih tetap terjaga dalam kisaran sasaran nasional yaitu dalam rentang 1,5% sampai dengan 3,5%. Meskipun demikian nilai inflasi tersebut menunjukkan peningkatan apabila dibandingkan dengan tingkat inflasi tahun 2024 yang tercatat sebesar 1,57% (yoy). Dibandingkan dengan Negara G20 lain, tingkat inflasi Indonesia mencatatkan nilai yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan Amerika Serikat sebesar 2,7% (yoy), Singapura sebesar 1,2% (yoy) dan India sebesar 1,33% (yoy).

Indonesia's inflation rate in 2025 was expected to remain relatively stable, at 2.92% (yoy). This achievement indicated that inflation remained within the national target range of 1.5% to 3.5%. However, this inflation rate was an increase compared to the 2024 inflation rate of 1.57% (yoy). Compared to other G20 countries, Indonesia's inflation rate was higher than the United States (2.7% yoy), Singapore (1.2% yoy), and India (1.33% yoy).

Grafik Tingkat Inflasi Desember 2024 - Desember 2025
Inflation Rate December 2024 - December 2025

dalam % yoy)
(in % year-on-year)

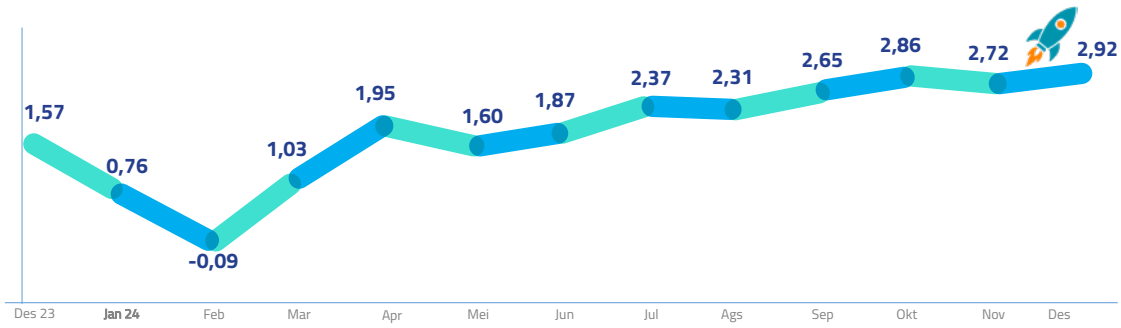

Sumber: Berita Resmi Statistik No. 01/01/Th. XXIX, Badan Pusat Statistik, 5 Januari 2026
Source: Official Statistics News No. 01/01/Year XXIX, Central Statistics Agency, January 5, 2026

Kinerja Manufaktur PMI Indonesia berdasarkan data S&P Global berada pada area ekspansif (>50 poin) pada awal tahun namun mengalami kontraksi antara April sampai dengan Juli 2025 dengan nilai PMI di bawah 50, dan kembali mengalami ekspansi dari Agustus sampai dengan Desember 2025 dengan mencapai nilai PMI sebesar 51,2 di Desember 2025. Beberapa negara ASEAN lain dengan ekonomi berbasis manufaktur, seperti Malaysia dan Vietnam, juga mencatatkan PMI manufaktur yang ekspansif dengan level masing - masing 50,2 dan 53.

According to S&P Global data, Indonesia's Manufacturing PMI was in the expansionary area (>50 points) at the beginning of the year, but contracted between April and July 2025, with a PMI below 50. It then expanded again from August to December 2025, reaching a PMI of 51.2 in December 2025. Several other ASEAN countries with manufacturing-based economies, such as Malaysia and Vietnam, also recorded expansionary manufacturing PMIs, with levels of 50.2 and 53, respectively.

Grafik Purchasing Managers Index (PMI) Indonesia
Purchasing Managers Index (PMI) Indonesia

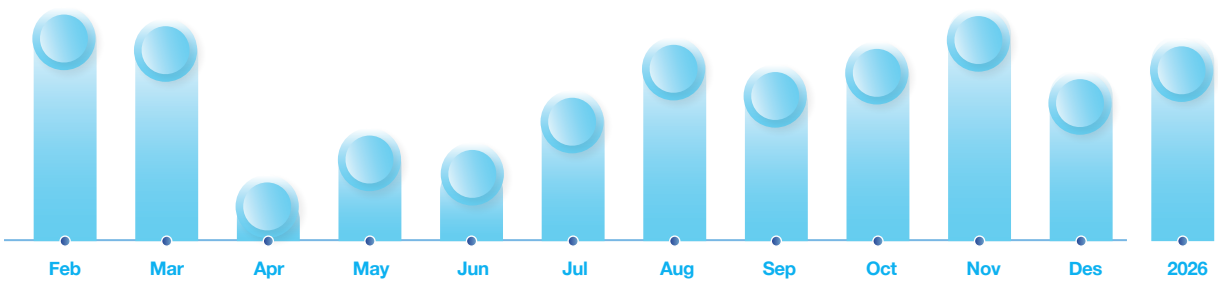

ANALISIS INDUSTRI PELABUHAN

PERDAGANGAN PETIKEMAS

Secara global, perekonomian dunia diproyeksikan tetap bertumbuh, namun pengaruhnya terhadap pertumbuhan volume kontainer diprediksi menurun yang ditunjukkan dengan penurunan multiplier TEUs-PDB. Pada tahun 2025 perekonomian global mencapai sekitar USD117,2 triliun, meningkat dari sekitar USD111,1 triliun pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan berlanjutnya pemulihan ekonomi global setelah periode perlambatan pada tahun-tahun sebelumnya, serta menunjukkan stabilitas pertumbuhan yang konsisten menuju tren jangka panjang. Pertumbuhan pada tahun 2025 juga menjadi bagian dari tren peningkatan rata-rata sekitar 4% per tahun, yang menandakan bahwa aktivitas ekonomi global tetap berada dalam jalur ekspansi yang sehat. Tren kenaikan ini mencerminkan keberlanjutan aktivitas ekonomi global yang didukung oleh normalisasi kegiatan ekonomi, perbaikan rantai pasok, serta peningkatan produktivitas melalui adopsi teknologi di berbagai sektor industri.

PORT INDUSTRY ANALYSIS

CONTAINER TRADE

Globally, the world economy was projected to continue growing, but its influence on container volume growth was predicted to decline, as indicated by a decline in the TEUs-GDP multiplier. In 2025, the global economy was expected to reach approximately USD 117.2 trillion, up from approximately USD 111.1 trillion in 2024. This increase reflected the continued global economic recovery after a period of slowdown in previous years and demonstrated consistent growth stability toward the long-term trend. Growth in 2025 is also part of an average annual increase was approximately 4%, indicating that global economic activity remained on a healthy expansionary path. This upward trend reflected the sustainability of global economic activities, supported by the normalization of economic activities, supply chain improvements, and increased productivity through the adoption of technology across industrial sectors.

Grafik Proyeksi Produk Domestik Bruto (PDB) Dunia (dalam triliun USD)
Global Gross Domestic Product (GDP) Projections (in trillions of USD)

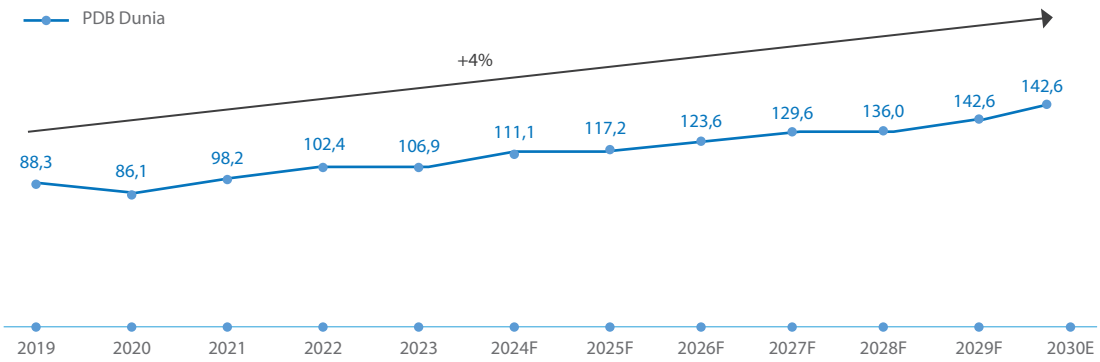

Sumber: International Monetary Fund (IMF), Oktober 2025
Source: International Monetary Fund (IMF), October 2025

Di sisi lain, penurunan multiplier pertumbuhan petikemas (dalam satuan TEUs) terhadap pertumbuhan PDB dunia mencapai dibawah satu kali yang disebabkan oleh penerapan kebijakan proteksionisme yang membatasi perdagangan internasional serta menurunnya perdagangan global secara keseluruhan, kegiatan perekonomian global yang melambat akibat pandemi COVID-19 yang menyebabkan pembatasan aktivitas ekspor-impor, dan kondisi geopolitik antara Rusia-Ukraina yang menghambat kegiatan perdagangan global sehingga mengurangi traffic petikemas secara keseluruhan.

On the other side, the decline in the multiplier of container growth (in TEU units) on global GDP growth had reached one factor below due to the protectionist policies that restricted international trade and the decline in overall global trade, the slowdown in global economic activity due to the COVID-19 pandemic, which had resulted in restrictions on exports and imports, and the geopolitical situation between Russia and Ukraine, which hampered global trade activities, thus reducing overall container traffic.

Grafik Pertumbuhan TEUs terhadap Pertumbuhan PDB Dunia (dalam kelipatan)
TEU Growth to Global GDP Growth (in multiples)

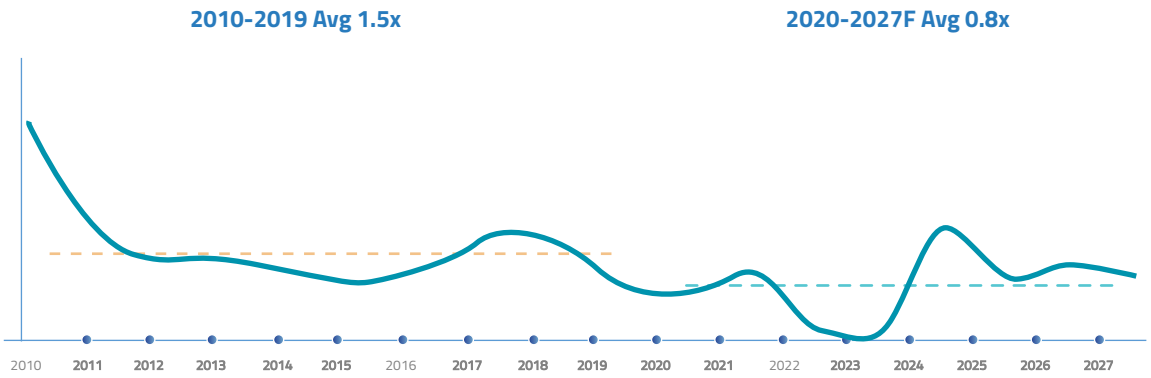

Sumber: Data Drewry, Tahun 2025
Source: Drewry Data, 2025

Sebagai dampak dari penurunan multiplier tersebut, pertumbuhan throughput petikemas global diproyeksikan cenderung stagnan dengan CAGR 2,5% (2024-2027). Namun, pertumbuhan throughput petikemas global tersebut masih didominasi oleh Asia sebagai kontributor utama dengan porsi mencapai 54,0%. Selain itu, Asia juga memiliki pertumbuhan dalam 4 (empat) tahun terakhir sebesar 3,4%, lebih tinggi dari pertumbuhan petikemas dunia yang sebesar 3,3%.

As a result of this declining multiplier, global container throughput growth was expected to stagnate at a CAGR of 2.5% (2024-2027). However, Asia remained the primary contributor, accounting for 54.0%, and Asia had also recorded growth of 3.4% over the past four years, exceeding the global container growth rate of 3.3%.

Grafik Throughput Petikemas Global
Global Container Throughput

Region	2021	2022	2023	2024	2025	2026F	Avg. Cont. (%)	CAGR (%)
Asia	460.461	480.907	494.343	510.164	525.699	540.404	54,0%	3,4%
Europe	142.634	150.025	153.611	158.098	162.244	166.182	16,7%	3,3%
North America	77.129	79.359	81.495	84.293	87.435	90.439	8,9%	3,2%
Latin America	53.506	54.018	55.384	57.198	59.051	60.858	6,1%	2,5%
Middle East	39.72	41.131	42.144	43.099	43.963	44.85	4,6%	2,6%
South Asia	34.091	36.078	37.951	40.257	42.757	45.339	4,2%	5,8%
Africa	33.119	33.785	34.945	36.381	37.82	39.24	3,9%	3,4%
Oceania	13.857	14.362	14.716	15.137	15.556	15.96	1,6%	2,9%
Total	854.517	889.665	914.589	944.627	974.525	1.003.272	100,00%	3,3%

Sumber: Data Drewry, Tahun 2025
Source: Drewry Data, 2025

Berdasarkan distribusi wilayah, Asia tetap menjadi kontributor utama terhadap throughput peti kemas global pada tahun 2025, dengan volume mencapai sekitar 525,7 juta TEUs atau sekitar 54,0% dari total global. Dominasi kawasan Asia ini mencerminkan peran sentral kawasan tersebut sebagai pusat manufaktur dan perdagangan dunia, serta tingginya aktivitas perdagangan intra-Asia. Selain Asia, kawasan Eropa dan Amerika Utara juga

Based on regional distribution, Asia still remained the leading contributor to global container throughput in 2025, with volumes reaching approximately 525.7 million TEUs, or approximately 54.0% of the global total. This dominance reflects the region's central role as a global manufacturing and trade hub, as well as its high intra-Asia trade activity. In addition to Asia, Europe and North America also showed stable growth, contributing approximately 16.7% and

menunjukkan pertumbuhan yang stabil, masing-masing berkontribusi sekitar 16,7% dan 8,9% terhadap total global. Kawasan lain seperti Amerika Latin, Timur Tengah, Asia Selatan, Afrika, dan Oseania turut menunjukkan tren pertumbuhan positif meskipun dengan pangsa yang relatif lebih kecil.

PERDAGANGAN NON PETIKEMAS

Secara umum arus non-petikemas Indonesia mengalami pertumbuhan yang stabil namun moderat selama periode 2020–2024, dengan CAGR sekitar 5,2%. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh segmen curah kering yang mendominasi lebih dari 82% total volume dan tumbuh konsisten dari 1.567 menjadi 1.930 juta ton. Hal ini mengindikasikan bahwa struktur logistik Indonesia masih sangat bergantung pada komoditas berbasis sumber daya alam seperti batu bara dan mineral. Sementara itu, curah cair relatif stagnan di kisaran 10%, mencerminkan pertumbuhan yang terbatas pada komoditas energi cair, sedangkan general cargo dan kendaraan justru menunjukkan tren penurunan kontribusi (dari 7,6% ke 7,1%), yang dapat mengindikasikan pergeseran ke arah kontainerisasi atau efisiensi distribusi barang jadi.

8.9%, respectively, to the global total. Other regions, such as Latin America, the Middle East, South Asia, Africa, and Oceania, also showed positive growth trends, albeit with relatively smaller shares.

NON-CONTAINER TRADE

In general, Indonesia's non-containerized cargo traffic experienced stable but moderate growth during the 2020–2024 period, with a CAGR of approximately 5.2%. This growth was primarily driven by the dry bulk segment, which dominated more than 82% of total volume and grew consistently from 1,567 million tons to 1,930 million tons. This showed that Indonesia's logistics structure remained heavily reliant on natural resource-based commodities such as coal and minerals. While, liquid bulk remained relatively stagnant at around 10%, reflecting limited growth in liquid energy commodities. General cargo and vehicles actually showed a downward trend in their contribution (from 7.6% to 7.1%), which could indicate a shift towards containerization or efficiency in the distribution of finished goods.

Grafik Volume Perdagangan Curah Dunia, 2020 - 2024
World Bulk Trade Volume, 2020-2024)

(dalam juta ton)
(in million tons)

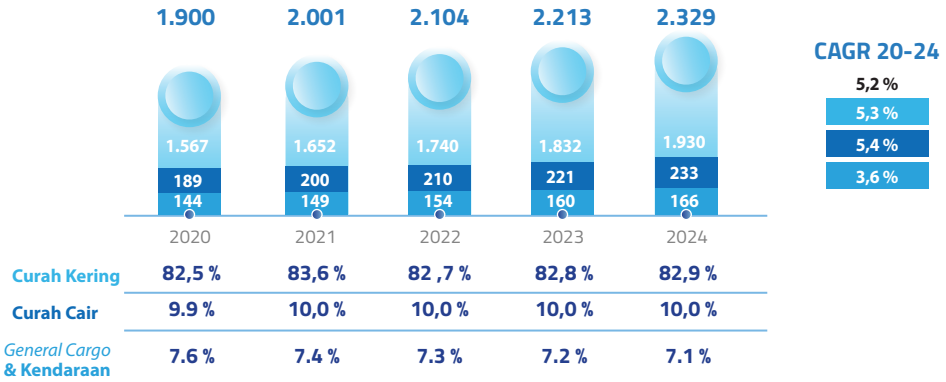

	2020	2021	2022	2023	2024
Curah Kering	82,5 %	83,6 %	82 ,7 %	82,8 %	82,9 %
Curah Cair	9.9 %	10,0 %	10,0 %	10,0 %	10,0 %
General Cargo & Kendaraan	7.6 %	7.4 %	7.3 %	7.2 %	7.1 %

Sumber: IHS Markit, bulan xxx, tahun xxx
Source: IHS Markit

Di Indonesia, pertumbuhan volume perdagangan nonpetikemas sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian domestik. Dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat, permintaan domestik akan meningkat, yang akan berpengaruh terhadap permintaan dan harga komoditas nonpetikemas, begitupun sebaliknya. Selama beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami berbagai tantangan ekonomi, antara lain berasal dari ketidakpastian ekonomi global, perubahan kebijakan perdagangan, gejolak ekonomi dan politik di beberapa negara yang merupakan mitra perdagangan utama Indonesia. Beberapa faktor tersebut berimplikasi secara langsung pada aktivitas perdagangan ekspor-impor dari dan ke Indonesia yang pada akhirnya juga akan berdampak pada volume perdagangan nonpetikemas di Indonesia.

In Indonesia, the non-containerized trade volume growth was heavily influenced by domestic economic conditions. Strong economic growth leads to increased domestic demand, which in turn impacts the demand and prices of non-containerized commodities, and vice versa. Over the past few years, Indonesia has experienced economic challenges, including global economic uncertainty, changes in trade policies, and economic and political turmoil in several of Indonesia's major trading partners. These factors had direct implications for export-import trade activities to and from Indonesia, which ultimately impacted non-containerized trade volume in Indonesia.

Terdapat salah satu tantangan utama yang dihadapi Pelindo dalam pengembangan bisnis nonpetikemas yaitu keberadaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dan Terminal Khusus (Tersus). Terdapat lebih dari 2.000 TUKS dan Tersus yang tersebar di wilayah Indonesia dan melayani bongkar muat nonpetikemas yang dikelola oleh pihak BUMN selain Pelindo dan Swasta. Persebaran jumlah TUKS dan Tersus yang tinggi disebabkan oleh proses pengajuan perizinan yang mudah serta pengguna jasa yang telah tersegmentasi sehingga terminal tersebut dapat melakukan kegiatan usaha secara mandiri (Pertamina, PLN). Kehadiran TUKS dan Tersus turut menciptakan dinamika persaingan yang kompleks bagi Pelindo. Sehingga, untuk mengatasi tantangan ini, Pelindo perlu melakukan pendekatan yang kolaboratif melalui kerja sama dengan TUKS dan Tersus agar Pelindo dapat mengakses sumber daya tambahan serta membuka jaringan dan meningkatkan pangsa pasar dalam segmen nonpetikemas di Indonesia.

One of the main challenges facing Pelindo in developing its non-container business is the existence of Terminals for Own Use (TUKS) and Special Terminals (Tersus). There are more than 2,000 TUKS and Tersus across Indonesia, serving non-container loading and unloading activities, managed by state-owned enterprises (SOEs) other than Pelindo and private companies. The high number of TUKS and Tersus is due to the simplified licensing process and the segmented service users that allows these terminals to operate independently (Pertamina, PLN). The presence of TUKS and Tersus contributes to complex competitive dynamics for Pelindo. Therefore, to address this challenge, Pelindo needs to adopt a collaborative approach through cooperation with TUKS and Tersus to access additional resources, expand its network, and increase market share in the non-container segment in Indonesia.

ANALISIS POSISI PELINDO DALAM INDUSTRI

Pada tahun 2025, Pelindo meraih peringkat ke-4 (empat) kategori Shipping Industry di Asia Tenggara dan peringkat ke-157 di antara 500 Perusahaan decngan pendapatan terbesar di Kawasan Asia Tenggara berdasarkan Fortune Southeast Asia 500.

Selain itu, Pelindo juga berada pada peringkat ke 2 (dua) throughput petikemas terbesar di Asia Tenggara dan memimpin 95% pangsa pasar petikemas di Indonesia dengan volume throughput yang terus menunjukkan tren positif dan meningkat dari 18,8 juta TEUs pada tahun 2024 menjadi 19,79 juta TEUs pada tahun 2025 atau lebih tinggi 5,3% dibandingkan tahun 2024. Peningkatan throughput petikemas ini merupakan dampak positif dari upaya dan komitmen Pelindo untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan melalui transformasi operasional maupun bisnis.

Sesuai dengan tema tahun 2025 yang merupakan fase Integrated Connectivity, di tahun 2025 Pelindo terus berupaya meningkatkan konektivitas multimoda beserta integrasi hinterland antara kawasan industri dengan Pelabuhan untuk mendukung peningkatan kinerja Korporasi ke depannya.

ANALYSIS OF PELINDO'S POSITION IN THE INDUSTRY

By 2025, Pelindo was ranked fourth in the Shipping Industry category in Southeast Asia and 157th among the 500 companies with the largest revenues in the Southeast Asia region, according to the Fortune Southeast Asia 500.

Furthermore, Pelindo was also ranked second in terms of container throughput in Southeast Asia and commanded a 95% share of the Indonesian container market. Its throughput volume continued to show a positive trend, increasing from 18.8 million TEUs in 2024 to 19.79 million TEUs in 2025, a 5.3% increase compared to 2024. This increase in container throughput had a positive impact of Pelindo's efforts and commitment to continuously provide the best service to customers through operational and business transformation.

In line with the 2025 theme of Integrated Connectivity, Pelindo will continue its efforts to improve multimodal connectivity and hinterland integration between industrial areas and ports to support the Corporation's future performance.

Gambar Daftar Peringkat 500 Fortune 2025 Kategori Shipping Industry
2025 Fortune 500 Rankings, Shipping Industry Category

RANK	NAME	REVENUES ($M)	REVENUE PERCENT CHANGE	PROFITS ($M)	PROFITS PERCENT CHANGE	ASSETS ($M)	EMPLOYEES
60	PSA International	$5,780.2	9.4%	$819.3	-24.8%	$22,354.7	58,000
97	BW LPG	$3,563.7	20.9%	$354.3	-24.6%	$3,320.4	1,500
121	MISC	$2,895	-7.6%	$261	-44%	$13,526.2	9,536
157	Pelabuhan Indonesia (Pelindo)	$2,199.5	-2.2%	$226.3	-9.9%	$7,932.1	6,754
209	Hutchison Port Holdings Trust (HPH Trust)	$1,482.4	9.1%	$83.3	179.5%	$10,524.3	2,400
268	Regional Container Lines	$995.2	27.6%	$260.1	502.1%	$2,055.2	870

Sumber: Fortune Southeast Asia 500, Tahun 2025
Source: Fortune Southeast Asia 500, 2025

Gambar Regional Benchmark Comparison 2024 (Local Port)
Regional Benchmark Comparison 2024 (Local Port)

(dalam juta TEUs)
(in million TEUs)

Rank	Owner/Operator	Total Throughput	Rank	Owner/Operator	Total Throughput
1	PSA	40,9	6	Hutchison	11.0
2	Pelindo	81,8	7	Saigon	9,1
3	MMC	16,3	8	CMA CGM	8,2
4	ICTSI	13,1	9	Vietnam NSL	6,2
5	APM	12,3	10	PAT	5,6

Sumber: Data Drewry, Tahun 2025
Source: Drewry Data, 2025

Tinjauan Operasional
National Economic Analysis

STRATEGI PERUSAHAAN

STRATEGI JANGKA PANJANG

Strategi Perusahaan telah diformulasikan ke dalam rumah strategi Pelindo untuk periode 2025-2029 yang terdiri dari Visi, Misi, Pilar Strategis, dan Enablers. Pilar atau tema strategis juga menjadi acuan untuk mendefinisikan sub-tema strategis bagi Pelindo hingga tahun 2029 yang akan menjadi basis dalam mendefinisikan inisiatif strategis. Untuk mendukung ketercapaian strategi perusahaan, telah dirancang juga key enablers yang harus dipenuhi. *Key Enablers* merupakan sekumpulan tindakan dan aktivitas utama yang akan mendorong kelancaran implementasi strategi dan memperkuat fondasi Pelindo dalam mencapai visinya sebagai pemimpin ekosistem maritim Indonesia yang berkelas dunia. Visi, Misi, Pilar Strategi dan *Key Enablers* Pelindo yang diwujudkan dalam bentuk rumah strategi perusahaan.

CORPORATE STRATEGY

LONG-TERM STRATEGY

The Corporate Strategy has been formulated into Pelindo's strategic house for the 2025-2029 period, and consists of the Vision, Mission, Strategic Pillars, and Enablers. The strategic pillars or themes also serve as a reference for defining strategic sub-themes for Pelindo until 2029, which will serve as the basis for defining strategic initiatives. To support the achievement of the corporate strategy, key enablers have also been designed. Key enablers are a set of key actions and activities that will drive the smooth implementation of the strategy and strengthen Pelindo's foundation in achieving its vision as a world-class leader in Indonesia's maritime ecosystem. Pelindo's Vision, Mission, Strategic Pillars, and Key Enablers are embodied in the corporate strategy house.

Gambar Rumah Strategi Perusahaan
Corporate Strategy House

Penjelasan dari masing-masing komponen Rumah Strategi adalah sebagai berikut:

Visi dan Misi Pelindo

Pelindo memiliki visi untuk menjadi pemimpin ekosistem maritim terintegrasi dan berkelas dunia, dan misi untuk mewujudkan jaringan ekosistem maritim nasional melalui peningkatan konektivitas jaringan dan integrasi pelayanan guna mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pilar I: *Business Expansion and Integration of Maritime Ecosystem Value Chain*
Pilar strategis pertama bertujuan untuk menjadikan Pelindo sebagai market leader di setiap lini bisnis di sepanjang value chain ekosistem maritim melalui ekspansi bisnis dan integrasi antar layanan. Pilar ini berfokus pada ekspansi bisnis Pelindo yang dilakukan melalui pengembangan pelabuhan/terminal baru, pengembangan bisnis MEPS yang terfokus, dan penetrasi ke market baru. Di samping itu, pilar ini berfokus pada integrasi layanan melalui optimalisasi *cross-selling* bisnis kepada pengguna jasa guna menjadikan Pelindo sebagai penyedia end-to-end maritime services yang terintegrasi, sehingga meningkatkan attractiveness layanan Pelindo. Terakhir, pilar ini turut mendukung peningkatan konektivitas jaringan maritim dan efisiensi biaya logistik melalui optimalisasi model hub and spoke dengan bekerjasama dengan shipping line domestik.

Pilar II: *Accelerate Port-Hinterland Connectivity and Logistic Network*
Pilar strategis kedua bertujuan untuk mewujudkan konektivitas antara pelabuhan dan kawasan hinterland dan mengembangkan jaringan logistik guna meningkatkan kinerja komersial perusahaan, mendorong efisiensi operasional dan biaya logistik, serta meningkatkan kualitas dan reliabilitas layanan bagi pengguna jasa. Hal ini dilakukan melalui beberapa strategi, yang meliputi pengembangan konektivitas multimoda, pengembangan kawasan industri di area pelabuhan, pengembangan pelabuhan di kawasan industri, serta kerjasama dengan pelaku industri logistik.

Pengembangan konektivitas multimoda bertujuan untuk mengintegrasikan pelabuhan dengan kawasan hinterland, yang berpotensi mendorong peningkatan volume kargo yang keluar-masuk pelabuhan, mengurangi biaya transportasi, dan mempercepat pergerakan kargo, sehingga berdampak pada peningkatan kinerja komersial perusahaan serta efisiensi biaya dan operasional. Pengembangan kawasan industri di area pelabuhan juga berpotensi mendorong peningkatan throughput dan menciptakan kepastian pasar bagi pelabuhan terkait. Selanjutnya, pengembangan pelabuhan di kawasan industri dilakukan untuk memfasilitasi integrasi layanan

An explanation of each component of the Strategy House is as follows:

Pelindo's Vision and Mission

Pelindo's vision is to become a world-class leader in an integrated maritime ecosystem, and its mission is to realize a national maritime ecosystem network through improved network connectivity and service integration to support Indonesia's economic growth.

Pillar I: Business Expansion and Integration of the Maritime Ecosystem Value Chain
The first strategic pillar aims to establish Pelindo as a market leader in every business line along the maritime ecosystem value chain through business expansion and integration between services. This pillar focuses on Pelindo's business expansion through the development of new ports/terminals, focused MEPS business development, and penetration into new markets. Also, this pillar focuses on service integration through optimizing business cross-selling to service users, establishing Pelindo as an integrated end-to-end maritime services provider, thereby enhancing the attractiveness of Pelindo's services. Finally, this pillar supports increased maritime network connectivity and logistics cost efficiency by optimizing the hub and spoke model in collaboration with domestic shipping lines.

Pillar II: Accelerate Port-Hinterland Connectivity and Logistics Network
The second strategic pillar aims to establish connectivity between ports and hinterland areas and develop logistics networks to improve the Company's commercial performance, drive operational efficiency and logistics costs, and enhance service quality and reliability for users. This can be achieved through several strategies, including the development of multimodal connectivity, the development of industrial estates within port areas, the development of ports within industrial estates, and collaboration with logistics industry players.

The multimodal connectivity development aims to integrate ports with hinterland areas, which have the potential to increase cargo volumes entering and leaving ports, reduce transportation costs, and accelerate cargo movement, thereby improving the Company's commercial performance and cost and operational efficiency. The development of industrial estates within port areas also has the potential to increase throughput and create market certainty for the ports involved. Also, the development of ports within industrial estates facilitates service integration to minimize transportation time and costs and increase the attractiveness of industrial areas. Finally,

guna meminimalkan waktu dan biaya transportasi serta meningkatkan daya tarik kawasan industri. Terakhir, peningkatan kerjasama dengan pelaku industri logistik penting untuk memperluas jaringan logistik guna meningkatkan daya saing pelabuhan, mengurangi biaya logistik, dan meningkatkan reliabilitas layanan.

Pilar III: *World Class Ecosystem Player*

Pilar ini memiliki dua tujuan utama: 1) Meningkatkan kapabilitas Pelindo sebagai penyedia layanan ekosistem maritim berkelas dunia, dan 2) Memulai ekspansi Pelindo ke ranah global. Tujuan pertama dilakukan melalui standardisasi, sistemisasi, dan integrasi layanan serta modernisasi infrastruktur dan peralatan guna mencapai peningkatan kinerja operasional dan keseragaman operasi di seluruh layanan Pelindo. Peningkatan kualitas layanan juga dilakukan melalui optimalisasi skema komersial serta standardisasi komersial, khususnya dalam hal customer relationship management. Selain itu, dalam rangka mendukung implementasi prinsip ESG di lingkungan Pelindo, dilakukan juga pengembangan sustainable ports melalui pelaksanaan program-program yang mendorong praktik berkelanjutan. Peningkatan kapabilitas dan kapasitas layanan Pelindo dimaksudkan untuk mendukung tujuan kedua dari pilar ini, yaitu ekspansi ke ranah global, yang dilakukan melalui kerjasama dengan mitra strategis global dalam pengembangan pelabuhan internasional dan layanan transhipment, serta ekspansi regional bisnis kepelabuhanan.

Enablers

Untuk mendukung keberhasilan implementasi ketiga pilar strategis, Pelindo perlu merealisasikan serangkaian enablers utama. Pilar key enablers mencakup 3 (tiga) aspek utama, yaitu pengembangan dan pemanfaatan teknologi dan sistem informasi untuk meningkatkan kinerja operasional, pengembangan kapabilitas SDM dan organisasi untuk mendorong efisiensi bisnis, serta pendanaan strategis untuk memastikan kecukupan modal dan menciptakan efisiensi biaya.

ROADMAP PERUSAHAAN

Untuk memastikan ketercapaian sasaran sesuai dengan visi dan inisiatif strategis yang telah ditetapkan untuk tahun 2029, Pelindo telah menyusun roadmap yang berfungsi sebagai panduan yang akan memberikan gambaran terkait tahapan dan strategi yang perlu diimplementasikan setiap tahunnya untuk mencapai sasaran perusahaan. Adapun roadmap Pelindo yang dimaksud adalah sebagai berikut:

increased collaboration with logistics industry players is crucial for expanding logistics networks to enhance port competitiveness, reduce logistics costs, and improve service reliability.

Pillar III: World-Class Ecosystem Player

This pillar has two main objectives: 1) Enhancing Pelindo's capabilities as a world-class maritime ecosystem service provider, and 2) Initiating Pelindo's global expansion. The first objective is achieved through standardization, systematization, and integration of services, as well as modernization of infrastructure and equipment to achieve improved operational performance and operational uniformity across all Pelindo services. Service quality is also enhanced through optimization of commercial schemes and commercial standardization, particularly in customer relationship management. Also, to support the ESG principles within Pelindo, sustainable ports are being developed through programs that encourage sustainable practices. Enhancing Pelindo's service capabilities and capacity is intended to support the second objective of this pillar, namely global expansion, which is achieved through collaboration with global strategic partners in the development of international ports and transshipment services, as well as regional expansion of the port business.

Enablers

To support the successful implementation of the three strategic pillars, Pelindo needs to realize a series of key enablers. These key enablers cover three main aspects: the development and utilization of technology and information systems to improve operational performance, the development of HC and organizational capabilities to drive business efficiency, and strategic funding to ensure capital adequacy and create cost efficiencies.

COMPANY ROADMAP

To ensure the achievement of targets in line with the vision and strategic initiatives established for 2029, Pelindo has developed a roadmap that serves as a guide and provides an overview of the stages and strategies that need to be implemented each year to achieve the Company's goals. The Pelindo roadmap in question is as follows:

Gambar Roadmap Perusahaan
Corporate Roadmap

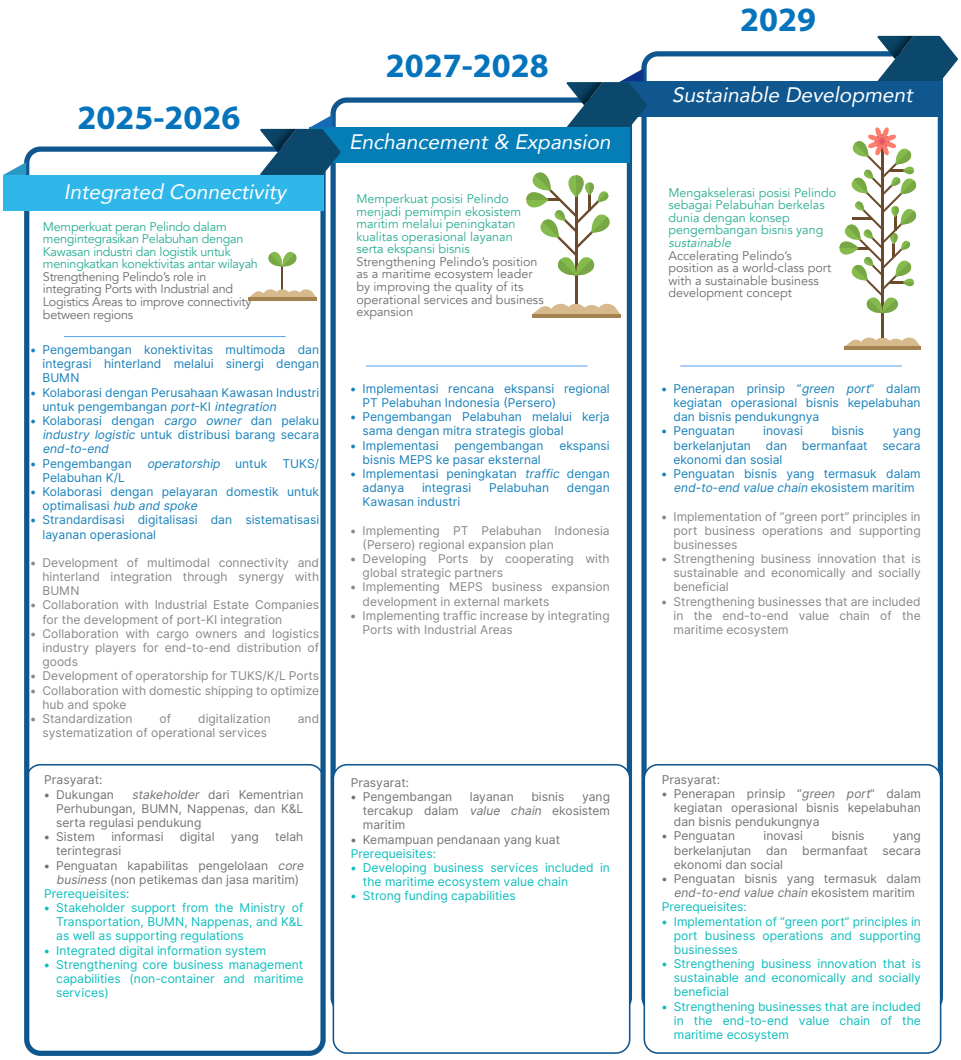

STRATEGI JANGKA PENDEK

Tahun 2025, Pelindo masuk dalam fase Integrated Connectivity yang berfokus pada:

1. Pengembangan konektivitas multimoda dan integrasi hinterland melalui sinergi dengan BUMN.
2. Kolaborasi dengan perusahaan Kawasan Industri untuk pengembangan port-KI Integration.
3. Kolaborasi dengan cargo owner dan pelaku industri logistik untuk distribusi barang secara end-to-end.
4. Pengembangan operatorship untuk Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS)/Pelabuhan Kementerian/ Lembaga (K/L).
5. Kolaborasi dengan pelayaran domestik untuk optimalisasi hub and spoke.
6. Standardisasi digitalisasi dan sistematisasi layanan operasional.

Penyusunan strategi Pelindo mengacu pada arah kebijakan BUMN dalam RPJPN 2025–2045 yang menekankan peningkatan daya saing, penciptaan nilai tambah, serta penguatan peran BUMN sebagai market leader baik di

SHORT-TERM STRATEGY

In 2025, Pelindo entered the Integrated Connectivity phase, focusing on:

1. Developing multimodal connectivity and hinterland integration through synergy with state-owned enterprises.
2. Collaborating with industrial estate companies to develop port-KI integration.
3. Collaborating with cargo owners and logistics industry players for end-to-end goods distribution.
4. Developing operatorship for Terminals for Own Interest (TUKS)/Ministry/Institutional Ports.
5. Collaborating with domestic shipping companies to optimize hub and spoke systems.
6. Standardizing digitalization and systematizing operational services.

Pelindo's strategy development refers to the BUMN directive policy in the 2025–2045 National Medium-Term Development Plan (RPJPN), which emphasizes increasing competitiveness, creating added value, and strengthening

tingkat domestik maupun global. Dalam dokumen RPJMN 2025–2029 yang menetapkan sasaran pembangunan nasional serta 8 (delapan) prioritas nasional. Dari keseluruhan prioritas nasional tersebut, Prioritas Nasional ke-5 memiliki keterkaitan langsung dengan peran strategis Pelindo, yaitu melanjutkan hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Implementasi prioritas ini menekankan pentingnya penguatan sistem logistik nasional melalui pembangunan infrastruktur konektivitas, optimalisasi layanan backbone logistik, serta integrasi ekosistem logistik secara *end-to-end.*

the role of state-owned enterprises as market leaders domestically and globally. The 2025–2029 National Medium-Term Development Plan (RPJMN) document sets out national development targets and eight national priorities. Of these national priorities, National Priority 5 is directly linked to Pelindo's strategic role: continuing the downstreaming and development of natural resource-based industries to increase domestic added value. Implementing this priority emphasizes the importance of strengthening the national logistics system through the development of connectivity infrastructure, optimization of backbone logistics services, and end-to-end integration of the logistics ecosystem.

Gambar Sasaran Prioritas 5 terkait Peningkatan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
Priority Target 5: Increasing Domestic and Global Economic Integration

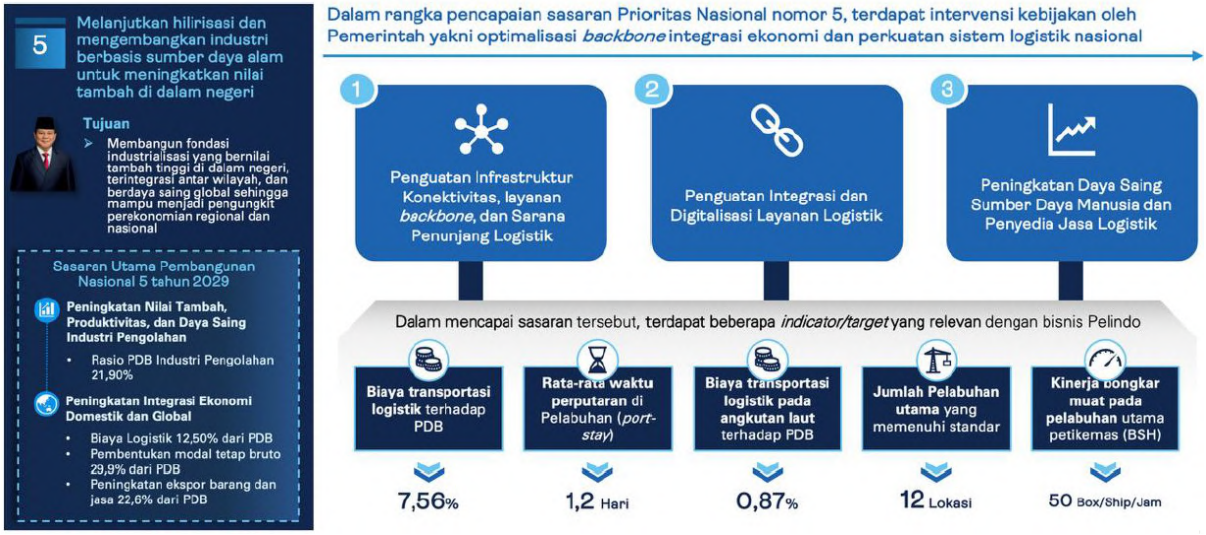

Strategi Pelindo disusun dengan mempertimbangkan keselarasan terhadap strategic imperatives PT Danantara Asset Management (DAM) sebagai pemegang mandat pengelolaan portofolio BUMN. Dalam kerangka tersebut, DAM menetapkan empat pedoman strategis utama bagi Pelindo:

1. Pedoman pertama adalah mengidentifikasi dan mengeksplorasi core growth drivers baru, baik dari

Pelindo's strategy has been formulated with alignment with the strategic imperatives of PT Danantara Asset Management (DAM), the state-owned enterprise (SOE) portfolio management mandate. Within this framework, DAM established four key strategic guidelines for Pelindo:

1. he first guideline was to identify and explore new core growth drivers, both domestically and internationally,

potensi domestik maupun internasional, termasuk pengembangan value added services serta peluang inorganic growth. Pedoman ini menekankan pentingnya ekspansi bisnis yang berbasis pada penciptaan nilai dan diversifikasi sumber pendapatan.
2. Pedoman kedua adalah mendukung integrasi jaringan transportasi dan logistik nasional. Hal ini mencerminkan peran strategis Pelindo sebagai simpul utama dalam ekosistem logistik nasional yang menghubungkan pelabuhan, kawasan industri, serta jaringan distribusi domestik dan global. Integrasi ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi supply chain serta memperkuat konektivitas antarwilayah.
3. Selanjutnya, DAM juga menekankan pentingnya peningkatan operational excellence guna memperkuat daya saing pelabuhan serta mewujudkan efisiensi biaya. Fokus ini mencakup transformasi operasional, peningkatan produktivitas, serta standarisasi layanan untuk mencapai tingkat layanan berkelas dunia.
4. Pedoman keempat adalah memastikan bahwa model bisnis Pelindo mampu mendukung pertumbuhan jangka panjang secara optimal, termasuk melalui realisasi sinergi pascakonsolidasi serta standarisasi layanan di seluruh entitas. Hal ini menjadi krusial dalam memaksimalkan manfaat integrasi Pelindo sebagai hasil merger serta dalam menciptakan skala ekonomi yang lebih efisien.

including the development of value-added services and inorganic growth opportunities. This guideline emphasizes the importance of business expansion based on value creation and diversification of revenue sources.
2. The second guideline was to support the integration of the national transportation and logistics network. This reflects Pelindo's strategic role as a key node in the national logistics ecosystem, connecting ports, industrial areas, and domestic and global distribution networks. This integration is expected to improve supply chain efficiency and strengthen interregional connectivity.
3. DAM also emphasizes the importance of enhancing operational excellence to strengthen port competitiveness and achieve cost efficiency. This focus includes operational transformation, productivity enhancement, and service standardization to achieve world-class service levels.
4. The fourth guideline was ensuring that Pelindo's business model are capable of optimally supporting long-term growth, including the realization of post-consolidation synergies and service standardization across all entities. This is crucial for maximizing the benefits of Pelindo's integration resulting from the merger and for creating more efficient economies of scale.

PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PSN) ATAU PENUGASAN LAIN

Berdasarkan Rekapitulasi Investasi Strategis Perseroan yang disajikan pada tabel di bawah ini, terdapat 1 (satu) Proyek Strategis Perseroan, 1 (satu) Proyek PMN, dan 12 Proyek yang menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

NATIONAL STRATEGIC PROJECTS (PSN) OR OTHER ASSIGNMENTS

Based on the Company's Strategic Investment Recapitulation presented in the table below, there is 1 (one) Company Strategic Project, 1 (one) State-Owned Investment Project, and 12 Projects designated as National Strategic Projects (PSN) as stipulated in the Republic of Indonesia Coordinating Minister for Economic Affairs Regulation No. 7 of 2023 concerning Amendments to Coordinating Minister for Economic Affairs Regulation No. 7 of 2021 concerning Amendments to the List of National Strategic Projects.

Tabel Rekapitulasi Daftar Investasi Proyek Strategis Nasional atau Penugasan Lain
Summary of Investment List for National Strategic Projects or Other Assignments

(dalam jutaan Rupiah)
(in millions of Rupiah)

No.	Nama Aktiva Activity Name	RKAP 2025	Realisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 Realization up to QIV 2025	Capaian (%) Achievement (%)	Keterangan Description
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)	
1	Pembangunan Terminal Kalibaru Utara Tahap I North Kalibaru Terminal Development Phase I	1.049.505	788.665	75,1	PS
2	Pembangunan Pelabuhan Kijing, Kalbar Phase I Kijing Port Development, West Kalimantan Phase I	260.845	88.347	33,9	PSN

Tabel Rekapitulasi Daftar Investasi Proyek Strategis Nasional atau Penugasan Lain
Summary of Investment List for National Strategic Projects or Other Assignments

(dalam jutaan Rupiah)
(in millions of Rupiah)

No.	Nama Aktiva Activity Name	RKAP 2025	Realisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 Realization up to QIV 2025	Capaian (%) Achievement (%)	Keterangan Description
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)	
3	Pembangunan Jalan Akses Timur Terminal Kalibaru East Access Road Construction for Kalibaru Terminal	1.592.136	420.048	26,4	PSN
4	Pengembangan Pelabuhan Benoa Benoa Port Development	78.000	34.559	44,3	PSN
5	Pekerjaan Pembangunan Makassar New Port Tahap 1B dan 1C Makassar New Port Development Phases 1B and 1C	8.500	2.054	24,2	PSN
6	Pembangunan Jalan Tol Cilincing Cibitung Cilincing-Cibitung Toll Road Development	-	-	-	PSN
7	Pembangunan Terminal Multipurposes Labuan Bajo Labuan Bajo Multipurpose Terminal Development	-	-	-	PSN
8	Pembangunan Fly Over dari dan menuju Terminal Teluk Lamong Flyover Construction to and from Teluk Lamong Terminal	-	-	-	PSN
9	Pengerukan Alur dan Kolam Pelabuhan Benoa Benoa Port Channel and Basin Dredging	145.900	162.952	111,7	PMN
10	Pengembangan Pelabuhan Kupang Kupang Port Development	-	-	-	PSN
11	Pengembangan Pelabuhan Sorong Eksisting-Arar Development of the Existing Sorong Port-Arar	-	-	-	PSN
12	Pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung Kuala Tanjung Port Development	-	-	-	PSN
13	Pengembangan Kawasan Industri Kuala Tanjung Kuala Tanjung Industrial Estate Development	57.400	53.515	93,23	PSN
14	Pekerjaan Pembangunan Terminal Multipurpose Batang Batang Multipurpose Terminal Development	240.000	150.330	62.6	PSN
	Jumlah Total	**3.432.286**	**1.694.494**	**49,36**	

Keterangan:
PS: Proyek Strategis Perseroan
PSN: Proyek Strategis Nasional
PMN: Penyertaan Modal Negara
Description:
PS: Company Strategic Project
PSN: National Strategic Project
PMN: State Capital Participation

(dalam jutaan Rupiah)
(in millions of Rupiah)

No.	Nama Aktiva Activity Name	RKAP 2025	Realisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 Realization up to QIV 2025	Capaian (%) Achievement (%)	Keterangan Description
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)	
1	Pembangunan Terminal Kalibaru Utara Tahap I North Kalibaru Terminal Development Phase I	1.049.505	788.665	75,1	PS
2	Pembangunan Pelabuhan Kijing, Kalbar Phase I Kijing Port Development, West Kalimantan Phase I	260.845	88.347	33,9	PSN
3	Pembangunan Jalan Akses Timur Terminal Kalibaru East Access Road Construction for Kalibaru Terminal	1.592.136	420.048	26,4	PSN
4	Pengembangan Pelabuhan Benoa Benoa Port Development	78.000	34.559	44,3	PSN
5	Pekerjaan Pembangunan Makassar New Port Tahap 1B dan 1C Makassar New Port Development Phases 1B and 1C	8.500	2.054	24,2	PSN
6	Pembangunan Jalan Tol Cilincing Cibitung Cilincing-Cibitung Toll Road Development	-	-	-	PSN
7	Pembangunan Terminal Multipurposes Labuan Bajo Labuan Bajo Multipurpose Terminal Development	-	-	-	PSN
8	Pembangunan Fly Over dari dan menuju Terminal Teluk Lamong Flyover Construction to and from Teluk Lamong Terminal	-	-	-	PSN
9	Pengerukan Alur dan Kolam Pelabuhan Benoa Benoa Port Channel and Basin Dredging	145.900	162.952	111,7	PMN
10	Pengembangan Pelabuhan Kupang Kupang Port Development	-	-	-	PSN
11	Pengembangan Pelabuhan Sorong Eksisting-Arar Development of the Existing Sorong Port-Arar	-	-	-	PSN
12	Pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung Kuala Tanjung Port Development	-	-	-	PSN
13	Pengembangan Kawasan Industri Kuala Tanjung Kuala Tanjung Industrial Estate Development	57.400	53.515	93,23	PSN
14	Pekerjaan Pembangunan Terminal Multipurpose Batang Batang Multipurpose Terminal Development	240.000	150.330	62.6	PSN
	Jumlah Total	3.432.286	1.694.494	49,36	

Keterangan:
PS: Proyek Strategis Perseroan
PSN: Proyek Strategis Nasional
PMN: Penyertaan Modal Negara
Description:
PS: Company Strategic Project
PSN: National Strategic Project
PMN: State Capital Participation

PEMBANGUNAN TERMINAL KALIBARU UTARA TAHAP I

Realisasi penyerapan anggaran Pembangunan Terminal Kalibaru Utara Tahap I hingga Triwulan IV Tahun 2025 sebesar Rp788,7 miliar atau 75,1% dari nilai RKAP Tahun 2025 sebesar Rp1,049 triliun. Berikut rincian penjelasan progres pekerjaan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025:

1. Pelaksanaan Pekerjaan Rancang Bangun Terminal Kalibaru Tahap 1B Pelabuhan Tanjung Priok saat ini sedang berjalan dengan progres sebagai berikut:
   a. Telah diterbitkan Surat Perjanjian Nomor: PD.01/18/11/1/ADPG/UTMA/PLND-22 pada tanggal 18 November 2022.
   b. Telah diterbitkan Berita Acara Mulai Kerja (BAMK) Nomor: PD.05.01/22/11/3/PMO1/INVS/PLND-22 tanggal 22 November 2022 dan Berita Acara Serah Terima Lahan (BASTL) Nomor: PD.05.01/22/11/1/PMO1/INVS/PLND-22 tanggal 22 November 2022.
   c. Penyesuaian jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dengan telah diterbitkan Addendum Perjanjian Nomor:PD.01/13/12/2/PGTK/INVS/PLND-24 tanggal 13 Desember 2024, dimana waktu penyelesaian pekerjaan menjadi tanggal 28 Februari 2026, tanpa perubahan nilai pekerjaan.
   d. Penyesuaian jangka waktu pelaksanaan pekerjaan milestone 1B.1 sampai dengan 18 September 2025 yang telah diterbitkan Addendum II Perjanjian Nomor: PD.01/5/5/2/PGTK/INVS/PLND-25 tanggal 5 Mei 2025, dimana waktu penyelesaian milestone 1B.1 menjadi tanggal 28 Februari 2026, tanpa perubahan nilai pekerjaan.
   e. Terdapat penyesuaian jangka waktu pelaksanaan pekerjaan milestone 1B.1 sampai dengan 28 Februari 2026 yang telah diterbitkan Addendum III Perjanjian Nomor: PD.01/17/9/2/PGTK/INVS/PLND-25 tanggal 17 September 2025, penyesuaian tersebut dievaluasi karena terdapat perbedaan data tanah saat pelaksanaan dengan saat penyusunan DED yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya (*Unforeseen Condition*), tanpa perubahan nilai pekerjaan.
   f. Terdapat penyesuaian nomenklatur Struktur Organisasi Pelindo yang telah dituangkan dalam Adddendum IV Perjanjian Nomor: PD.01/24/12/4/PGTK/TEKN/PLND-25 tanggal 24 Desember 2025.
   g. Progres Pekerjaan Rancang Bangun Terminal Kalibaru Tahap 1B Pelabuhan Tanjung Priok sampai dengan Triwulan IV 2025 adalah sebesar 85,51%. Adapun kegiatan yang telah berlangsung sampai dengan saat ini adalah:
      - Pekerjaan pengembangan desain (DED).
      - Pekerjaan penimbunan dan pematangan lahan berupa pengadaan pasir timbunan, *Vacuum Preloading*, *Deep Soil Mixing (DSM), Deep Soil Compaction*, *Rigid Inclusion (CFG)* serta pemadatan dan perataan permukaan tanah.

NORTH KALIBARU TERMINAL DEVELOPMENT PHASE I

The budget absorption for the North Kalibaru Terminal Development Phase I through QIV 2025 was Rp788.7 billion, or 75.1% of the 2025 Work Plan and Budget (RKAP) of Rp1.049 trillion. The following details the work progress through QIV 2025:

1. The design and construction work for the Kalibaru Terminal Phase 1B at Tanjung Priok Port is currently underway with the following progress:
   a. Agreement Letter Number: PD.01/18/11/1/ADPG/UTMA/PLND-22 issued on November 18, 2022.
   b. The Work Commencement Report (BAMK) Number: PD.05.01/22/11/3/PMO1/INVS/PLND-22 dated November 22, 2022, and the Land Handover Report (BASTL) Number: PD.05.01/22/11/1/PMO1/INVS/PLND-22 dated November 22, 2022, have been issued.
   c. Adjustment of the work timeline, as outlined in Addendum to Agreement Number: PD.01/13/12/2/PGTK/INVS/PLND-24 dated December 13, 2024, with the completion date set for February 28, 2026, with no change in the value of the work.
   d. Adjustment of the timeline for milestone 1B.1 to September 18, 2025, as outlined in Addendum II to Agreement Number: PD.01/5/5/2/PGTK/INVS/PLND-25 dated May 5, 2025, with the completion date set for milestone 1B.1 to February 28, 2026, with no change in the value of the work.
   e. There was an adjustment to the implementation period for Milestone 1B.1, extending it to February 28, 2026, as stipulated in Addendum III to the Agreement Number: PD.01/17/9/2/PGTK/INVS/PLND-25 dated September 17, 2025. This adjustment was evaluated due to unforeseen differences between land data during implementation and during the DED preparation, without any change in the value of the work.
   f. There was an adjustment to the nomenclature of Pelindo's Organizational Structure, as outlined in Adddendum IV to Agreement Number: PD.01/24/12/4/PGTK/TEKN/PLND-25 dated December 24, 2025.
   g. The progress of the Kalibaru Terminal Phase 1B Design and Construction Work at Tanjung Priok Port as of QIV 2025 is 85.51%. The activities that have been carried out to date include:
      - Design development (DED) work.
      - Backfilling and land preparation work, including sand procurement, vacuum preloading, deep soil mixing (DSM), deep soil compaction, rigid inclusion (CFG), and land surface compaction and leveling.

- Pekerjaan dermaga berupa pengadaan dan pemancangan tiang SPSP, pekerjaan *boredpile*, *pile cap anchor deadman, capping beam* SPSP, dan pekerjaan angkur *tie-rod*.
- Pekerjaan sebagian *Reserved Area deck-on-pile* (struktur *interface*) berupa pengadaan dan pemancangan tiang *concrete spun pile (CSP)*, pekerjaan beton *pre-cast* dan *in-situ* (poer, balok dan pelat), pengadaan dan pemancangan *corrugated concrete spun pile* (CCSP), serta pekerjaan *anchor deadman*.
- Pekerjaan *breakwater* berupa pengadaan dan pemasangan batu *boulder*, fabrikasi dan instalasi armor A-Jack serta konstruksi dinding penahan tanah (L-*shape*).
- Pekerjaan persiapan pengerukan telah dilaksanakan pembaruan data kedalaman awal (p*re-dredge sounding*), persiapan pemasangan rambu navigasi (SBNP) di lokasi keruk dan pembersihan serta perataan jalur pipa keruk di area dumping, proses penyelesaian docking kapal CSD Puncak Besar, dan secara bersamaan telah dilakukan produksi dan pengadaan kelengkapan CSD (*steel pipe, connector, flexible, floater,* dan aksesoris lainnya).
- Pekerjaan monitoring lingkungan

2. Pekerjaan Jasa Konsultansi *Review* DED dan Supervisi Rancang Bangun Terminal Kalibaru Tahap 1B Pelabuhan Tanjung Priok oleh PT Haskoning Indonesia sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor: PD.01/23/9/1/ADP/TEK/PI.II-21 tanggal 29 September 2021 dan terdapat Addendum Surat Perjanjian Nomor: PD.01/2/7/2/PGTK/INVS/PLND-25 karena terdapat perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan fisik sampai dengan 28 Februari 2026, saat ini masih berjalan dengan nilai serapan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebesar Rp51,71 miliar dari nilai kontrak Rp59,96 miliar.
3. Pekerjaan Jasa Konsultan Pendampingan Penyelesaian Administrasi dan Komersial Pekerjaan Pembangunan Terminal Kalibaru Tahap 1A Pelabuhan Tanjung Priok oleh PT Haskoning Indonesia sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor: PD.01/26/4/1/SPGD/KLBR/PLND-24 tanggal 26 April 2024 dan terdapat Addendum Surat Perjanjian Nomor:PD.05.01/20/5/2/ADKB/UPKA/PLND-25 tanggal 20 Mei 2025 dimana pelaksanaan pendampingan diperpanjang sampai dengan 16 Januari 2026 saat ini sudah berjalan dengan nilai serapan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebesar Rp914,83 juta dari nilai kontrak Rp1,58 miliar.

- Pier work, including SPSP pile procurement and driving, bored pile work, deadman pile cap anchors, SPSP beam capping, and tie-rod anchor work.
- Partial work on the Reserved Area deck-on-pile (interface structure) including the procurement and driving of concrete spun piles (CSP), precast and in-situ concrete work (poer, beams, and slabs), the procurement and driving of corrugated concrete spun piles (CCSP), and anchor deadman work.
- Breakwater work including the procurement and installation of boulders, the fabrication and installation of A-Jack armor, and the construction of an L-shaped retaining wall.
- Dredging preparation work has been carried out, including updating the initial depth data (pre-dredge sounding), preparing the installation of navigation signs (SBNP) at the dredging location, cleaning and leveling the dredging pipeline in the dumping area, completing the docking process for the CSD Puncak Besar vessel, and simultaneously producing and procuring CSD equipment (steel pipe, connectors, flexible pipes, floaters, and other accessories).
- Environmental monitoring work

2. Consulting Services for the DED Review and Supervision of the Kalibaru Terminal Phase 1B Design and Construction Supervision for Tanjung Priok Port by PT Haskoning Indonesia in accordance with Agreement Letter Number: PD.01/23/9/1/ADP/TEK/PI.II-21 dated September 29, 2021, and an Addendum to Agreement Letter Number: PD.01/2/7/2/PGTK/INVS/PLND-25 due to an extension of the physical work implementation period until February 28, 2026. Currently, the project is still ongoing, with an absorption value of Rp51.71 billion up to QIV 2025, out of a contract value of Rp59.96 billion.
3. Consulting Services for Administrative and Commercial Completion of the Kalibaru Terminal Phase 1A Construction Work at Tanjung Priok Port by PT Haskoning Indonesia in accordance with Agreement Letter Number: PD.01/26/4/1/SPGD/KLBR/PLND-24 dated April 26, 2024, and an Addendum to Agreement Letter Number: PD.05.01/20/5/2/ADKB/UPKA/PLND-25 dated May 20, 2025, where assistance was extended until January 16, 2026, and is currently underway with an absorption value of Rp914.83 million up to QIV 2025, out of a contract value of Rp1.58 billion.

Berikut ini dokumentasi Pengembangan Pelabuhan Kalibaru

The following documents the Kalibaru Port Development:

Gambar Progres Pekerjaan Rancang Bangun Terminal Kalibaru Tahap 1B
Progress on the Kalibaru Terminal Design and Construction Phase 1B

Gambar *Aerial View* Proyek Pembangunan Kalibaru Tahap 1B
Aerial View of the Kalibaru Development Project Phase 1B

Gambar Pekerjaan Penimbunan dan Perbaikan Tanah
Landfilling and Land Improvement Work

Gambar Pekerjaan Konstruksi Dermaga
Pier Construction Work

Gambar Pekerjaan Sebagian *Reserved Area (Interface)*
Partial Work in Reserved Areas (Interface)

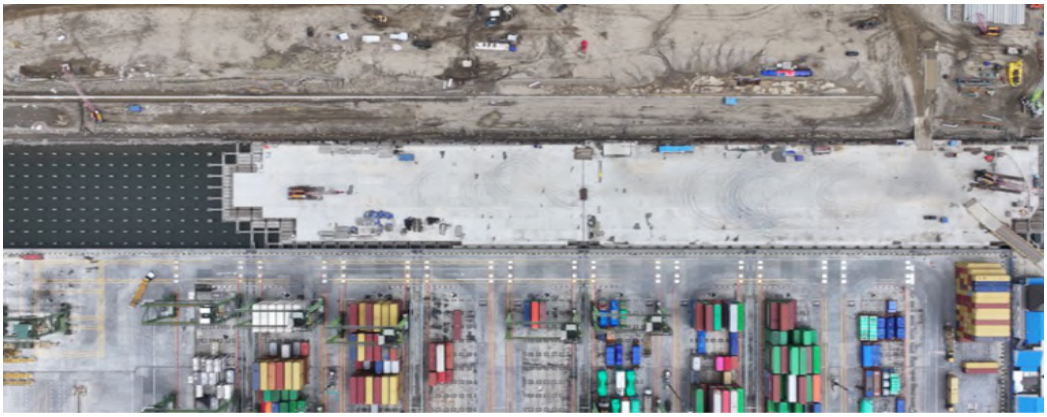

Gambar Pekerjaan Peninggian *Breakwater*
Breakwater Raising Work

PEMBANGUNAN TERMINAL KIJING PHASE I

Pembangunan Pelabuhan Kijing, Kalimantan Barat Phase 1 Triwulan IV tahun 2025 terealisasi sebesar Rp88,34 miliar, terserap 33,9% dari nilai RKAP Tahun 2025 sebesar Rp260,8 miliar. Adapun rincian pekerjaan Pembangunan Terminal Kijing yaitu sebagai berikut:

1. Telah ditandatangani Perjanjian antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Pelindo Nomor: 07/PKS/SJ/2022 dan Nomor: PP.01/20/5/1/MPT/INVS/PLND-22 tanggal 20 Mei 2022 tentang Tukar Menukar Barang Milik Negara (BMN) berupa Sebagian Tanah, Jalan Nasional Arteri, dan Jembatan pada Jalan Nasional Arteri Ruas Sei Duri-Bts. Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Realisasi progres fisik Surat Perjanjian Induk Pembangunan Relokasi Jalan Nasional Ruas Sei Duri-Mempawah sampai dengan akhir Desember 2025 sebesar 58,25%.
3. Realisasi progres fisik Pekerjaan Penanganan Tanah Lunak pada Pembangunan Relokasi Jalan Nasional Ruas Sei Duri-Mempawah sampai dengan akhir Desember 2025 sebesar 87,61%.

KIJING TERMINAL DEVELOPMENT PHASE I

The construction of Kijing Port, West Kalimantan, Phase 1, in the QIV 2025, was realized at Rp88.34 billion, absorbing 33.9% of the 2025 Work Plan and Budget (RKAP) of Rp260.8 billion. The details of the Kijing Terminal construction project are as follows:

1. An agreement was signed between the Ministry of Public Works and Public Housing and Pelindo No. 07/PKS/SJ/2022 and No. PP.01/20/5/1/MPT/INVS/PLND-22 dated May 20, 2022, concerning the Exchange of State Property (BMN) in the Form of a Portion of Land, Arterial National Roads, and Bridges on the Sei Duri-Bts Arterial National Road Section, Mempawah Regency, West Kalimantan Province.
2. The physical progress of the Master Agreement for the Relocation of the Sei Duri-Mempawah National Road Section reached 58.25% by the end of December 2025.
3. The physical progress of the Soft Soil Handling Work for the Relocation of the Sei Duri-Mempawah National Road Section reached 87.61% by the end of December 2025.

Gambar Pekerjaan Timbunan
Embankment Work

Gambar Pekerjaan Struktur
Structural Work

PEMBANGUNAN JALAN AKSES TIMUR KALIBARU

Pembangunan Jalan Akses Timur Pelabuhan Kalibaru Triwulan IV Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp420 miliar, terserap 26,4% dari nilai RKAP Tahun 2025 sebesar Rp1,592 trilliun. Kegiatan konstruksi Jalan Akses Timur Kalibaru / *New Priok Eastern Access* ("NPEA") dilaksanakan dalam 2 (dua) paket pekerjaan yaitu NPEA Seksi I dan NPEA Seksi II. Saat ini Pembangunan Jalan Akses Timur Kalibaru dalam tahap pelaksanaan konstruksi NPEA Seksi I dan Seksi II.

KALIBARU EAST ACCESS ROAD CONSTRUCTION

The construction of the Kalibaru Port East Access Road in QIV 2025 was realized at Rp420 billion, absorbing 26.4% of the 2025 Work Plan and Budget (RKAP) of Rp1.592 trillion. Construction of the Kalibaru East Access Road / New Priok Eastern Access ("NPEA") is being implemented in two work packages: NPEA Section I and NPEA Section II. The construction of the Kalibaru East Access Road is currently in the construction phase for NPEA Sections I and II.

Gambar Layout Proyek Jalan Akses Timur Baru Kalibaru/Priok
Layout of the New East Access Road Project for Kalibaru/Priok

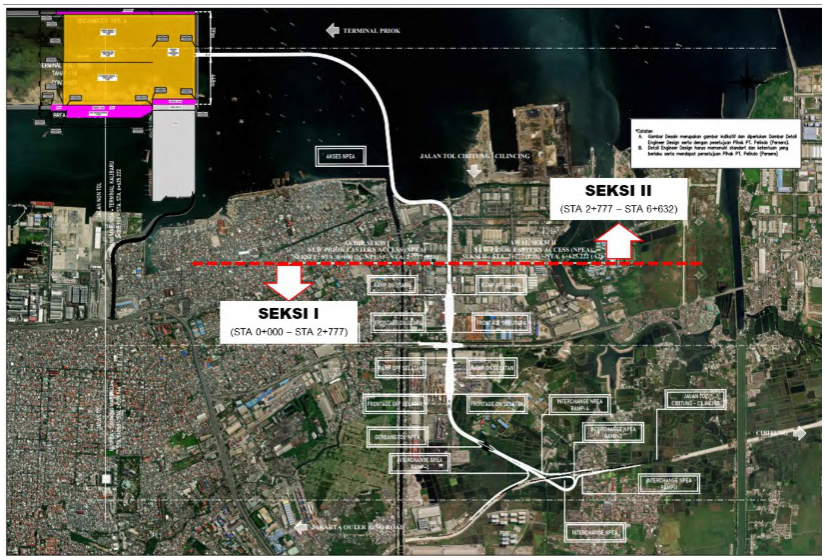

Progres pekerjaan saat ini dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Hasil Kajian Komersial dan Konsep Umum Perencanaan Jalan Akses Timur Kalibaru/ *New Priok Eastern Access* (NPEA) selesai disusun dan dilaporkan kepada Direksi.

2. Penyelesaian Jasa Pendampingan dan Konsultansi Penyusunan *Review* Kajian Bisnis dan Studi Kelayakan Proyek *New Priok Eastern Access* dimana hasil studi telah disampaikan kepada Direksi.

Current work progress can be reported as follows:

1. The results of the Commercial Study and General Concept for the Kalibaru East Access Road/New Priok Eastern Access (NPEA) were completed and reported to the Board of Directors.
2. Completion of the Advisory and Consultancy Services for the Preparation of the Business Review and Feasibility Study for the New Priok Eastern Access Project, the results of which were submitted to the Board of Directors.

3. Pengurusan Perizinan dengan Instansi terkait (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Perhubungan) untuk memenuhi persyaratan dokumen Pembangunan Jalan Akses Timur Kalibaru/*New Priok Eastern Access* (NPEA). Adapun progres pengurusan perizinan antara lain:
   a. Pengajuan Trase NPEA pada revisi Dokumen Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Priok menunggu penetapan Dokumen Revisi RIP Tanjung Priok.
   b. Penerbitan Persetujuan Dokumen *Basic Design* dan *Right of Way Plan* Akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru/*New Priok Eastern Access* (NPEA) oleh Direktur Jalan Bebas Hambatan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tanggal 19 Oktober 2022.
   c. Terkait Izin AMDAL, Telah diterbitkan Dokumen Persetujuan Lingkungan pada tanggal 12 Oktober 2023 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
   d. Terkait Dokumen *Basic Design,* sedang dilakukan penyesuaian struktur akibat potensi singgungan dengan Tanggul PTPIN Kementerian PUPR dan akibat adanya permintaan penyesuaian clearance pada area *Tenant* PT KBN.
   e. Penerbitan Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (RKKPR) oleh Kementerian ATR/BPN pada Tanggal 23 Mei 2022.
   f. Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Tanggal 18 Mei 2022.
   g. Penerbitan Dokumen Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas dengan Bangkitan Lalu Lintas Tinggi, Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Jalan Tol New Priok Eastern Access (NPEA) di Jalan Akses Marunda Cilincing, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta pada tanggal 29 Desember 2022 oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
   h. Telah terbit Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor: 375/SK-31.72.AT.02.04/XI/2023 tanggal 14 November 2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru di Kelurahan Cilincing dan Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara. Telah terbit Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Lahan Terdampak Pembangunan NPEA pada 3 Juni 2024 oleh Tim Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan Jakarta Utara. Saat ini telah dilakukan validasi terhadap 129 Daftar Nominatif dari 194 Daftar Nominatif hasil Identifikasi dan Inventarisasi Tim Kantor Pertanahan Jakarta Utara, terhadap 65 Daftar Nominatif yang belum tervalidasi, saat ini masih dilakukan pemeriksaan dokumen oleh Tim Pelaksana Pengadaan Tanah NPEA. Telah dibayarkan juga 141 Daftar Nominatif dari 194 Daftar Nominatif.

3. Permit processing with relevant agencies (Jakarta Provincial Government, Ministry of PUPR, Ministry of ATR/BPN, Ministry of Maritime Affairs and Fisheries, Ministry of Environment, and Ministry of Transportation) to fulfill the document requirements for the Kalibaru East Access Road/New Priok Eastern Access (NPEA) construction. The progress of permit processing includes:
   a. Submission of the NPEA route for the revised Tanjung Priok Port Master Plan Document is pending the approval of the Revised Tanjung Priok Port Master Plan Document.
   b. Issuance of Approval of the Basic Design Document and Right of Way Plan for the New Tanjung Priok Eastern Access (NPEA) by the Director of Toll Roads, Directorate General of Highways, Ministry of Public Works and Public Housing on October 19, 2022.
   c. For the AMDAL Permit, the Ministry of Environment and Forestry issued an Environmental Approval Document on October 12, 2023.
   d. For the Basic Design Document, structural adjustments are being made due to potential contact with the PTPIN Embankment from the Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR) and a request for clearance adjustments in the PT KBN Tenant area.
   e. The Ministry of ATR/BPN issued a Recommendation for Suitability of Spatial Utilization Activities (RKKPR) on May 23, 2022.
   f. The Ministry of Maritime Affairs and Fisheries issued a Marine Spatial Utilization Activity Suitability Approval (PKKPRL) on May 18, 2022.
   g. The Jakarta Provincial Government issued a Traffic Impact Analysis Approval Document with High Traffic Generation, Traffic Impact Analysis of the New Priok Eastern Access (NPEA) Toll Road Construction on the Marunda Cilincing Access Road, North Jakarta City, DKI Jakarta, on December 29, 2022.
   h. The Head of the North Jakarta Land Office Decree Number 375/SK-31.72.AT.02.04/XI/2023 dated November 14, 2023, concerning the Establishment of a Land Acquisition Task Force for the Construction of the New Tanjung Priok East Port Access in Cilincing and Marunda Villages, Cilincing District, North Jakarta. The Identification and Inventory Results of Land Affected by the NPEA Construction were issued on June 3, 2024, by the Land Acquisition Team of the North Jakarta Land Office. Validation of 129 of the 194 Nominative Lists has been conducted by the North Jakarta Land Office Identification and Inventory Team. The 65 Nominative Lists that have not been validated are currently undergoing document review by the NPEA Land Acquisition Implementation Team. Payments have also been made for 141 of the 194 Nominative Lists.

i. Perjanjian antara Pelindo dan PT Kawasan Berikat Nusantara tanggal 2 September 2025 tentang Pemberian Ganti Kerugian dalam Bentuk Lain atas Aset Terdampak Pengadaan Tanah Milik PT Kawasan Berikat Nusantara untuk Pembangunan Akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru/ New Priok Eastern Access (NPEA).
j. Berita Acara Kesepakatan antara Pelindo dan PT CTP tanggal 3 September 2025 tentang Pengoperasian dan Pemeliharaan Jalan Tol Akses Timur Kalibaru/ New Priok Eastern Access (NPEA).
k. Penerbitan Surat Nomor: UM.006/21/12/KSOP. TPK/2025tanggal 10 Desember 2025 perihal Pertimbangan Terhadap Aspek Keselamatan dan Keamanan Pelayaran Terhadap Permohonan Izin Pemanfaatan Garis Pantai yang Menunjang Proyek Strategis Nasional *New Priok Eastern Access* (NPEA) Seksi II oleh Pelindo.
l. Penerbitan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 16 Desember 2025.

4. Terkait Perjanjian Pemanfaatan Lahan KBN, bahwa Pemanfaatan Lahan PT KBN untuk Pembangunan NPEA dilakukan melalui mekanisme UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum. Saat ini telah ditunjuk konsultan untuk melakukan Kajian Kelayakan Pengembangan Port Integrated Logistic Center pada Lahan KBN dan sedang dilakukan kajian Pengembangan Area C.03 PT KBN dan isu lainnya dengan PT KBN akibat adanya Pembangunan Jalan NPEA.
5. Terkait Pemilihan Mitra NPEA, bahwa diputuskan Pembangunan NPEA akan dibangun sendiri dengan biaya Pelindo.
6. Terkait Pengadaan Konsultan MK dan Supervisi, telah diterbitkan Surat Perjanjian dengan PT API Nomor: PD.01/11/6/2/MAKA/UPKA/PLND-25 untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru / *New Priok Eastern Access* (NPEA) Seksi I dan Seksi II pada tanggal 11 Juni 2025 dan telah ditindaklanjuti dengan penerbitan Berita Acara Mulai Kerja (BAMK) Nomor: PD.05.01/18/6/2/MAKA/UPKA/PLND-25 tanggal 18 Juni 2025.
7. Terkait Pengadaan Kontraktor Fisik NPEA, Pembangunan NPEA dibagi dalam 2 Seksi yaitu Seksi I dimulai dari STA 0+000 – STA 2+777 dan Seksi II dimulai dari STA 2+777 – STA 6+625.222. Progress pengadaan Kontraktor Seksi I telah diterbitkan Surat Perjanjian Nomor: PD.05.01/2/7/5/MAKA/UPKA/PLND-25 tanggal 2 Juli 2025 tentang Pekerjaan Rancang Bangun Pembangunan Akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru/ *New Priok Eastern Access* (NPEA) Seksi I: STA.0+000 (IC NPEA) - STA. 2+777(P38) dengan Kontraktor Hutama – Abipraya KSO, dan telah diterbitkan Berita Acara Mulai Kerja (BAMK) Nomor: PD.05.01/9/9/4/MAKA/UPKA/PLND-25 tanggal 9 September 2025. Progres pengadaan Kontraktor Seksi II telah diterbitkan Surat Perjanjian

i. Agreement between Pelindo and PT Kawasan Berikat Nusantara dated September 2, 2025, concerning the Provision of Compensation in Other Forms for Assets Affected by the Acquisition of Land Owned by PT Kawasan Berikat Nusantara for the Development of the New Priok Eastern Access (NPEA) Port Access.
j. Minutes of Agreement between Pelindo and PT CTP dated September 3, 2025, concerning the Operation and Maintenance of the Kalibaru East Access (NPEA) Toll Road.
k. Issuance of Letter Number: UM.006/21/12/KSOP. TPK/2025 dated December 10, 2025, concerning Considerations Regarding the Safety and Security of Shipping Aspects Regarding Pelindo's Application for a Coastline Utilization Permit to Support the New Priok Eastern Access (NPEA) National Strategic Project Section II.
l. Issuance of the Statement of Commitment to Environmental Management and Monitoring (SPPL) dated December 16, 2025.

4. For the KBN Land Utilization Agreement, the utilization of PT KBN's land for the NPEA development was carried out through the mechanism of Law Number 2 of 2012 concerning Land Acquisition for Public Interest. A consultant was appointed to conduct a feasibility study for the development of a Port Integrated Logistics Center on KBN's land, and a study is currently underway to address the development of PT KBN's Area C.03 and other issues with PT KBN related to the NPEA road construction.
5. For the selection of the NPEA partner, it was decided that the NPEA will be built independently at Pelindo's expense.
6. For the Procurement of MK Consultants and Supervision, a Letter of Agreement with PT API Number: PD.01/11/6/2/MAKA/UPKA/PLND-25 was issued for Construction Management Consulting Services for the Development of New Tanjung Priok Eastern Access (NPEA) Sections I and II on June 11, 2025, and has been followed up with the issuance of a Work Commencement Report (BAMK) Number: PD.05.01/18/6/2/MAKA/UPKA/PLND-25 on June 18, 2025.
7. For the Procurement of NPEA Physical Contractors, the NPEA Construction was divided into two Sections: Section I starting from STA 0+000 - STA 2+777 and Section II starting from STA 2+777 - STA 6+625.222. The progress of procurement of Section I Contractor has been issued with a Letter of Agreement Number: PD.05.01/2/7/5/MAKA/UPKA/PLND-25 dated July 2, 2025 regarding the Design and Construction Work for the New Tanjung Priok Eastern Access Port Access (NPEA) Section I: STA.0+000 (IC NPEA) - STA. 2+777(P38) with Hutama Contractor - Abipraya KSO, and the Work Commencement Minutes (BAMK) Number: PD.05.01/9/9/4/MAKA/UPKA/PLND-25 dated September 9, 2025 has been issued. The progress of procurement of Section II Contractor was issued

Nomor: PD.05.01/2/7/2/MAKA/UPKA/PLND-25 tanggal 2 Juli 2025 tentang Pekerjaan Rancang Bangun Pembangunan Akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru/ *New Priok Eastern Access* (NPEA) Seksi II: STA. 2+777 (P38) - STA. 6+625.222 (A2) dengan Kontraktor PT PP, dan telah di terbitkan Berita Acara Mulai Kerja (BAMK) Nomor: PD.05.01/8/8/2/MAKA/UPKA/PLND-25 tanggal 8 Agustus 2025.

8. Terkait progres fisik Pekerjaan NPEA Seksi I telah dilakukan Sosialisasi Konsep Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Pembangunan NPEA di area KBN dan telah dilakukan sosialisasi Pelaksanaan NPEA Seksi I dengan tokoh masyarakat Marunda dan Cilincing di Area Interchange serta instansi terkait.

9. Terkait progres DED NPEA Seksi I, hingga desember 2025 sebagai berikut:
   a. Bahwa terkait Rekomendasi RTA dari Direktorat Jalan Bebas Hambatan untuk segmen jalan akses tol (STA 0+000 – STA 1+878), telah dilakukan Rapat Pembahasan RTA Parsial pada tanggal 17 Desember 2025 yang ditindak lanjuti dengan asistensi pada tanggal 22 Desember 2025 terkait desain struktur dan geoteknik. Pelindo juga telah menyampaikan surat kepada Direktur JBH pada tanggal 22 Desember 2025 perihal Penyampaian Tindak Lanjut Risalah Rapat 2 IND/UPKA/2/2026 Pembahasan RTA dan Permohonan Pleno Parsial.
   b. Bahwa terkait Persetujuan Desain untuk Pelaksanaan Konstruksi Jembatan Khusus Proyek Pembangunan NPEA oleh Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ), telah dilakukan rapat pembahasan persetujuan desain Struktur Jembatan P3-P6 Crossing JTCC dan Desain Struktur Jembatan P25-P28 Simpang Marunda ke-2 pada tanggal 18 Desember 2025 untuk Seksi I.

10. Terkait progres fisik Pekerjaan NPEA Seksi I adalah sebagai berikut:
    a. Realisasi progress Seksi I sampai akhir tahun 2025 sebesar 2.9544%. Pekerjaan Persiapan diantaranya perizinan, pembuatan Direksi Keet, Mobilisasi alat/personil dan lainnya. Pekerjaan Pemantauan Lingkungan.
    b. Pekerjaan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Pembangunan, pembuatan Detour 1, 2, 3, dan 4 di area marunda utara untuk pemenuhan rekomtek andalalin.
    c. Proses Detail Engineering Design (“DED”).
    d. Pekerjaan Manajemen Mutu Pekerjaan Pembongkaran.
    e. Pekerjaan Galian Perkerasan Beton.
    f. Pekerjaan Struktur sampai dengan Desember 2025, diantaranya:
       - Pekerjaan Bored Pile sejumlah 25 titik pada area P37, P36, P35.

through a Letter of Agreement Number: PD.05.01/2/7/2/MAKA/UPKA/PLND-25 dated July 2, 2025 regarding the Design and Construction Work for the New Tanjung Priok Eastern Access Port Access (NPEA) Section II: STA. 2+777 (P38) - STA. 6+625.222 (A2) with the contractor PT PP, and the Work Commencement Report (BAMK) Number: PD.05.01/8/8/2/MAKA/UPKA/PLND-25 was issued on August 8, 2025.

8. Regarding the physical progress of the NPEA Section I work, a socialization of the NPEA Traffic Engineering Management Concept for the KBN Development area was conducted, and socialization of the NPEA Section I Implementation was conducted with community leaders in the Marunda and Cilincing Interchange Areas, as well as relevant agencies.

9. For the progress of the NPEA Section I DED, as of December 2025, as follows:
   a. For the RTA Recommendation from the Directorate of Toll Roads for the toll access road segment (STA 0+000 - STA 1+878), a Partial RTA Discussion Meeting was held on December 17, 2025, followed by assistance on December 22, 2025, regarding structural and geotechnical design. Pelindo also submitted a letter to the Director of JBH on December 22, 2025, regarding the Submission of Follow-Up Actions to the Minutes of Meeting 2, IND/UPKA/2/2026, Discussing the RTA and Requesting a Partial Plenary Session.
   b. For the Design Approval for the Construction of the Special Bridge for the NPEA Development Project by the Road Bridge and Tunnel Safety Commission (KKJTJ), a meeting was held on December 18, 2025, to discuss the approval of the P3-P6 Crossing JTCC Bridge Structure Design and the P25-P28 Marunda Intersection 2 Bridge Structure Design for Section I.

10. The physical progress of the NPEA Section I work is as follows:
    a. Actual progress of Section I as of the end of 2025 was 2.9544%. Preparatory work including permits, the establishment of a Board of Directors, mobilization of equipment/personnel, and other activities. Environmental monitoring work is underway.
    b. Traffic Engineering Management Work: Construction of Detours 1, 2, 3, and 4 in the North Marunda area to fulfill traffic safety requirements.
    c. Detailed Engineering Design (“DED”) process.
    d. Demolition Quality Management Work.
    e. Concrete Pavement Excavation Work.
    f. Structural Work until December 2025, including:
       - Bored Pile Work at 25 locations in areas P37, P36, and P35.

- Pekerjaan Test Pile 4 titik CSP pada area *Ramp On/Off* Utara Marunda.
- Pekerjaan Manajemen Keselamatan Konstruksi.

11. Dokumentasi progres fisik Pekerjaan NPEA Seksi II adalah sebagai berikut:

- Test Pile Work at 4 CSP locations in the North Marunda Ramp On/Off area.
- Construction Safety Management Work.

11. Documentation on the physical progress of the NPEA Section II Work is as follows:

Gambar Pekerjaan Persiapan berupa Timbunan *Platform* dan Lapisan Geotex
Preparatory Work in the Form of Platform Embankments and Geotextile Layers

Gambar Pekerjaan Bored Pile Area P37 - P35
CSP Foundation Piling Work in the Marunda North Ramp Area

Gambar Pekerjaan Pemancangan Fondasi CSP Area Ramp Utara Marunda
Gambar Pekerjaan Pemancangan Fondasi CSP Area Ramp Utara Marunda

12. Terkait progres DED NPEA Seksi II, telah disampaikan surat tindak lanjut kepada KKJTJ atas hasil rapat persetujuan desain Jembatan P47–P50 tanggal 3 Desember 2025, telah dilaksanakan rapat pembahasan persetujuan desain kedua pada tanggal 10 Desember 2025, serta telah disampaikan kembali surat tindak lanjut hasil rapat kedua pada tanggal 24 Desember 2025. Selain itu, dari total 178 Dokumen DED, sebanyak 66 dokumen telah diajukan kepada Konsultan MK, dengan rincian 39 dokumen telah berstatus NoNo.
13. Terkait progres fisik Pekerjaan NPEA Seksi II adalah sebagai berikut:
    a. Realisasi progress Seksi II sampai akhir tahun 2025 sebesar 2.7402%
    b. Telah dilaksanakan Pekerjaan Bored Pile sebanyak 53 titik pada P43, P44, P45, dan P46 NPEA Seksi II pada bulan Desember 2025.
    c. Telah dilaksanakan Pekerjaan Pemancangan sebanyak 153 titik pada EJ 28 - EJ 27 NPEA Seksi II pada bulan Desember 2025.
    d. Dalam proses pelaksanaan Pekerjaan Galian Tanah untuk struktur P43A, P44A, dan P45A NPEA Seksi II pada bulan Desember 2025.
    e. Telah terbit surat dari KSOP Utama Tanjung Priok Nomor: UM.006/21/12/KSOP.TPK/20205 10 Desember 2025 perihal Pertimbangan Terhadap Aspek Keselamatan dan Keamanan Pelayaran Terhadap Permohonan Izin Pemanfaatan Garis Pantai Yang Menunjang Pekerjaan NPEA Seksi II oleh Pelindo.
14. Dokumentasi progres fisik Pekerjaan NPEA Seksi II adalah sebagai berikut:

12. For the progress of the NPEA Section II DED, a follow-up letter was submitted to the KKJTJ regarding the results of the P47-P50 Bridge design approval meeting on December 3, 2025. A second design approval discussion meeting was held on December 10, 2025, and a follow-up letter regarding the results of the second meeting was submitted on December 24, 2025. In addition, of the total 178 DED documents, 66 documents have been submitted to the MK Consultant, with 39 documents having the status NoNo.
13. The physical progress of the NPEA Section II work is as follows:
    a. Actual progress of Section II by the end of 2025 was 2.7402%.
    b. Bored pile work was completed at 53 points at P43, P44, P45, and P46 of NPEA Section II in December 2025.
    c. Piling work was completed at 153 points at EJ 28 - EJ 27 of NPEA Section II in December 2025.
    d. Excavation work for structures P43A, P44A, and P45A of NPEA Section II in December 2025.
    e. A letter was issued from the Tanjung Priok Main Port Authority (KSOP) Number: UM.006/21/12/KSOP.TPK/20205 dated December 10, 2025, concerning Considerations Regarding the Safety and Security Aspects of Shipping. Application for a Coastline Utilization Permit to Support the NPEA Section II Work by Pelindo.
14. Documentation on the physical progress of the NPEA Section II Work is as follows:

Gambar Area Stockyard Precast Tie Beam dan Pile Cap
Stockyard Area Precast Tie Beam and Pile Cap

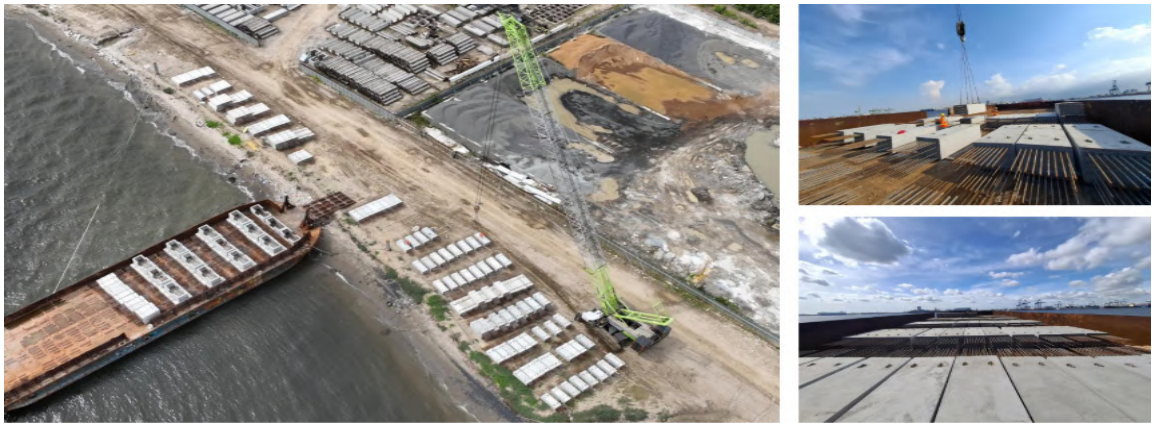

Gambar Pekerjaan Pemancangan CSP D600
CSP D600 Piling Work

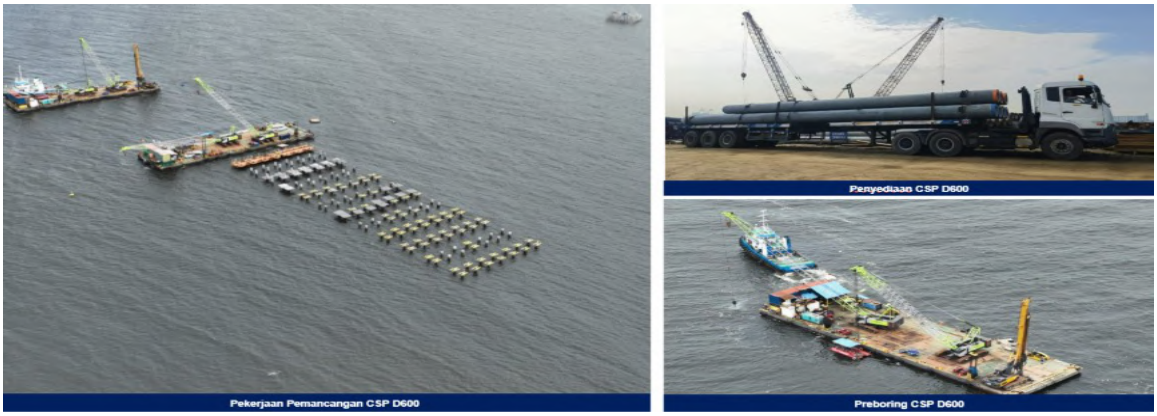

Gambar Pekerjaan Boredpile Area P43-P45
Boredpile Work in Area P43-P45

Gambar Pekerjaan Galian Area P43-P46
Excavation Work in Areas P43-P46

Area Galian Perkerasan Beton P46A

Area Galian Perkerasan Beton P40B

Galian Perkerasan Beton

PENGEMBANGAN PELABUHAN BENOA (BALI MARITIME TOURISM HUB)

Pembangunan Pelabuhan Benoa sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 terealisasi sebesar 34,5 milliar dari RKAP Tahun 2025 sebesar Rp78 miliar. Adapun penjelasan progres Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pekerjaan *Design and Build* Penyiapan Fasilitas Pemindahan Terminal LNG Ke Area Pengembangan II BMTH dengan Perjanjian Pemborongan Nomor: PD.05.01/21/2/3/RALT/DIRT/PLMT-25 tanggal 21 Februari 2025, telah dimulainya pekerjaan persiapan dengan dasar Berita Acara Mulai Pekerjaan pada 01 Maret 2025, adapun pemiliik pekerjaan ini adalah Subholding Pelindo yaitu PT Pelindo Multi Terminal.

BENOA PORT DEVELOPMENT (BALI MARITIME TOURISM HUB)

The development of Benoa Port by QIV 2025 has realized Rp34.5 billion, out of the Rp78 billion allocated in the 2025 Work Plan and Budget (RKAP). The progress for QIV 2025 is as follows:

1. Design and Build Work for the Preparation of Facilities for the Transfer of the LNG Terminal to Development Area II of the BMTH. Based on Contract Agreement Number: PD.05.01/21/2/3/RALT/DIRT/PLMT-25 dated February 21, 2025, preparatory work has commenced, based on the Work Commencement Report on March 1, 2025. The owner of this work is Pelindo's subholding, PT Pelindo Multi Terminal.

Gambar Layout Pekerjaan Design and Build Penyiapan Fasilitas Pemindahan Terminal LNG Ke Area Pengembangan II BMTH
Layout of Design and Build Work for Preparation of Facilities for Transferring the LNG Terminal to Development Area II of BMTH

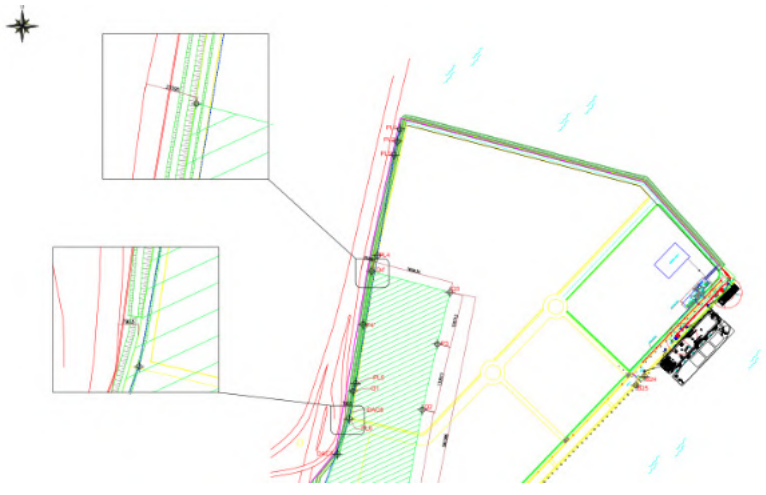

2. Pekerjaan Pembangunan Floating Pontoon Untuk Breakwater Di Kolam Area Pengembangan 1 Pelabuhan Benoa dengan Surat Perjanjian Nomor: PD.01/7/5/1/ADMT/BMTH/PLND-25 tanggal 07 Mei 2025

   Penjelasan progres pekerjaan adalah sebagai berikut:
   a. Telah ditanda tanganinya Berita Acara Mulai Pekerjaan dengan Nomor: PD.05.01/10/6/1/PECN/INVS/PLND-25 tanggal 10 Juni 2025.
   b. Telah disetujuinya pelaksanaan fisik oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Benoa sebagaimana Surat Nomor: UM.102/1/1/KSOP.BNA/2025 pada tanggal 24 Juni 2025
   c. Adapun telah tercapai progres fisik sebesar 56,56% (periode sampai dengan 31 Desember 2025)

2. Construction of a Floating Pontoon for a Breakwater in the Development Area 1 Pool at Benoa Port, with Agreement Letter Number: PD.01/7/5/1/ADMT/BMTH/PLND-25 dated May 7, 2025.

   The work progress is as follows:
   a. The Work Commencement Minutes have been signed with Number: PD.05.01/10/6/1/PECN/INVS/PLND-25 dated June 10, 2025.
   b. The physical implementation has been approved by the Head of the Harbormaster's Office and the Benoa Class II Port Authority, as per Letter Number: UM.102/1/1/KSOP.BNA/2025 on June 24, 2025.
   c. The physical progress has reached 56.56% (as of December 31, 2025).

Gambar Layout Pekerjaan Pembangunan Floating Pontoon Untuk Breakwater di Kolam Area Pengembangan 1
Construction Layout of a Floating Pontoon for Breakwater in Development Area 1 Pond

Pekerjaan Perbaikan Dermaga TImur Eksisting 340 M Pelabuhan Benoa Bali dengan Surat Perjanjian Nomor: PD.01/24/6/1/ADMT/BMTH/PLND-25 tanggal 24 Juni 2025.

Penjelasan progres pekerjaan adalah sebagai berikut:
1. Telah ditandatangani Berita Acara Mulai Pekerjaan dengan Nomor PD.05.01/21/7/1/PECN/INVS/PLND-25 tanggal 21 Juli 2025
2. Telah disetujuinya pelaksanaan fisik oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Benoa sebagaimana Surat Nomor AL.028/1/3/KSOP.BNA/2025 Tanggal 24 Juli 2025
3. Adapun telah tercapai progres fisik sebesar 46,41% (periode sampai dengan 31 Desember 2025)

Construction of a Floating Pontoon for a Breakwater in the Development Area 1 Pool at Benoa Port, with Agreement Letter Number: PD.01/7/5/1/ADMT/BMTH/PLND-25 dated May 7, 2025.

The work progress is as follows:
1. The Work Commencement Minutes have been signed with Number: PD.05.01/10/6/1/PECN/INVS/PLND-25 dated June 10, 2025.
2. The physical implementation has been approved by the Head of the Harbormaster's Office and the Benoa Class II Port Authority, as per Letter Number: UM.102/1/1/KSOP.BNA/2025 on June 24, 2025.
3. The physical progress has reached 56.56% (as of December 31, 2025).

Gambar Lokasi Pekerjaan Perbaikan Dermaga Timur Eksisting 340 M Pelabuhan Benoa Bali
Repair Work Location for the Existing 340-meter East Pier at Benoa Port, Bali

PEMBANGUNAN MAKASSAR NEW PORT TAHAP 1B DAN 1C

Makassar *New Port* merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres RI) Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional telah selesai 100% pada Tahun 2023. Adapun mata anggaran Pembangunan *Makassar New Port* Tahap IB dan Tahap IC Triwulan IV Tahun 2024 terdiri dari Pekerjaan Pembangunan Dermaga Lantamal VI yang mana terealisasi sebesar Rp10,18 miliar atau terserap 87,81% dari nilai RKAP Tahun 2024 sebesar Rp11,59 miliar.

Penjelasan progres pekerjaan adalah sebagai berikut:

1. Pekerjaan Pembangunan *Makassar New Port* Tahap IB dan Tahap IC dilaksanakan berdasarkan Akta Nomor 01 tanggal 01 Februari 2019 tentang Perjanjian Pemborongan antara PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) dengan PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk tentang Pekerjaan Pembangunan *Makassar New Port* Tahap 1B dan Tahap 1C, Addendum Perjanjian Pemborongan antara PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) dengan PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk. tentang Pekerjaan Pembangunan *Makassar New Port* Tahap IB dan Tahap IC Nomor: 3/HK.301/6/PI.IV-2021 dan Nomor: 140.1/EXT/PP/INFRA2/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 dan Addendum II Perjanjian Pemborongan antara Pelindo dengan PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk. tentang Pekerjaan Pembangunan *Makassar New Port* Tahap 1B dan Tahap 1C Nomor: PD.01/19/6/1/SPGD/INVS/PLND-23 tanggal 19 Juni 2023, dimana Triwulan IV Tahun 2023 telah selesai pekerjaan fisik 100%. Kegiatan pemeliharaan yang dilaksakan oleh PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk. Sebagai Kontraktor Pelaksana dinyatakan telah selesai per tanggal 31 Maret 2024.

MAKASSAR NEW PORT DEVELOPMENT PHASES 1B AND 1C

Makassar New Port is a National Strategic Project (PSN) as stipulated in Republic of Indonesia Presidential Regulation (Perpres RI) Number 109 of 2020 concerning the Third Amendment to Presidential Regulation Number 3 of 2016 concerning the Acceleration of National Strategic Projects. It was 100% completed in 2023. The budget line for Makassar New Port Development Phase IB and Phase IC for QIV 2024 consists of the Lantamal VI Pier Construction Work, with realized expenditure amounting to Rp10.18 billion, or 87.81% of the 2024 Work Plan and Budget (RKAP) of Rp11.59 billion.

The work progress is as follows:

1. The Makassar New Port Phase IB and Phase IC construction work is carried out based on Deed Number 01 dated February 1, 2019 concerning the Contracting Agreement between PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) and PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk concerning the Makassar New Port Phase 1B and Phase 1C construction work, Addendum to the Contracting Agreement between PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) and PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk. concerning the Makassar New Port Phase IB and Phase IC construction work Number: 3/HK.301/6/PI.IV-2021 and Number: 140.1/EXT/PP/INFRA2/VI/2021 dated June 21, 2021 and Addendum II to the Contracting Agreement between Pelindo and PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk. Regarding the Makassar New Port Phase 1B and Phase 1C Development Work, Number: PD.01/19/6/1/SPGD/INVS/PLND-23, dated June 19, 2023, 100% physical work was completed in the fourth quarter of 2023. Maintenance activities carried out by PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk., as the Implementing Contractor, were declared complete as of March 31, 2024.

2. Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk dan Reklamasi (PK3R) telah diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan pada tanggal 28 Januari 2022 untuk Pekerjaan Pengerukan dan Reklamasi di *Makassar New Port* (untuk kedalaman -16 mLWS, volume pengerukan ±5,300,550.09 m3, dan luasan reklamasi ±100,51 Ha).

Berikut ini dokumentasi Pembangunan *Makassar New Port* Tahap IB dan Tahap IC

2. The Ministry of Transportation issued a Dredging and Reclamation Work Approval (PK3R) on January 28, 2022, for the Dredging and Reclamation Work at Makassar New Port (for a depth of -16 mLWS, a dredging volume of approximately 5,300,550.09 m3, and a reclamation area of approximately 100.51 hectares).

The following is documentation on the Makassar New Port Phase IB and Phase IC Development Work.

Gambar Progres Pembangunan Makassar New Port Tahap 1B dan 1C
Makassar New Port Development Progress, Phases 1B and 1C

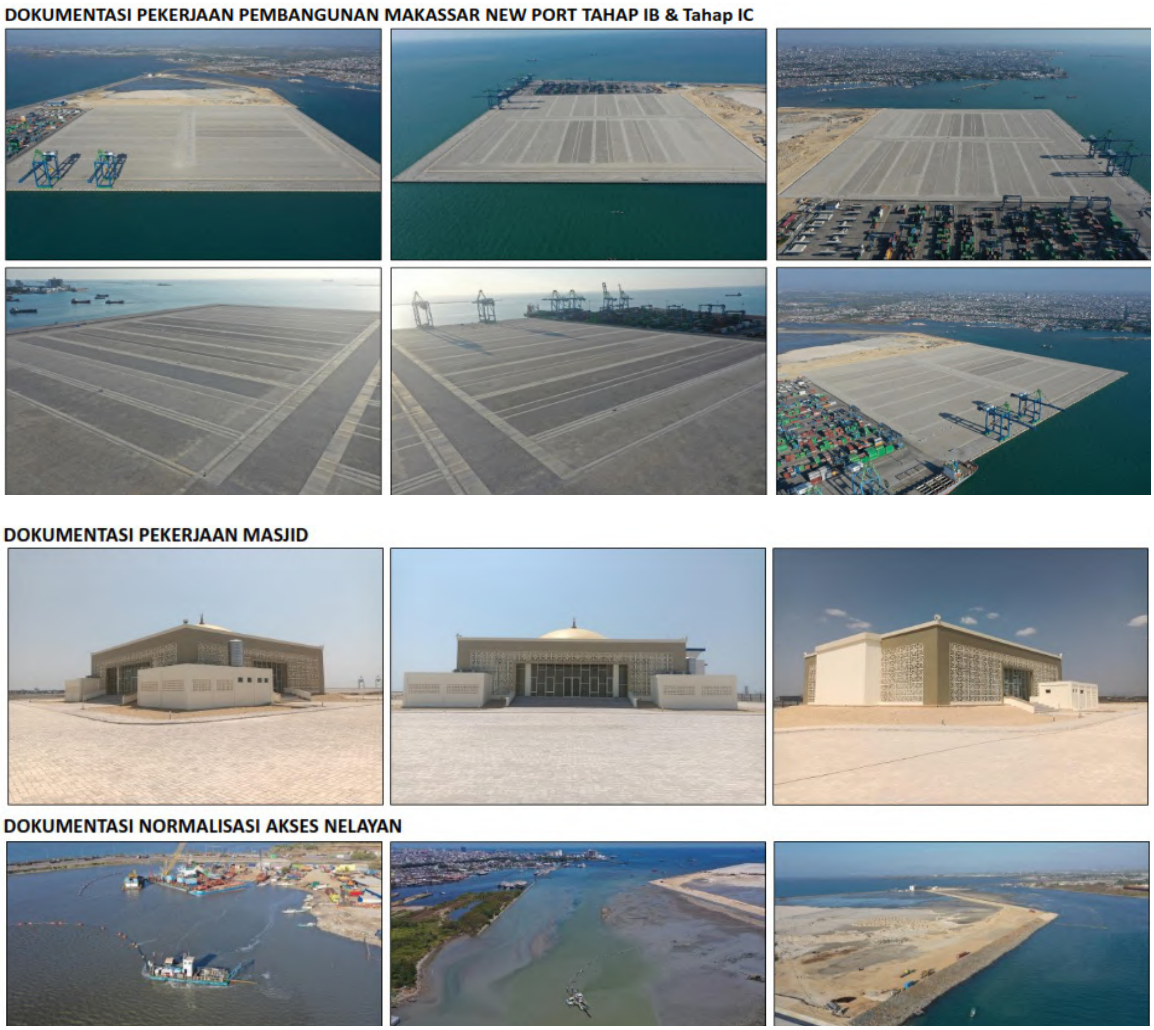

PEMBANGUNAN JALAN TOL CILINCING – CIBITUNG (JTCC)

Jalan Tol Cilincing Cibitung dibangun dengan tujuan utama untuk peningkatan konektivitas pelabuhan dan hinterland dimana JTCC akan terhubung dengan Jalan Akses Timur Kalibaru (NPEA), serta untuk mengurangi risiko kongesti di jalan eksisting. Pekerjaan fisik telah selesai tahun 2023 dan telah beroperasi dengan beberapa seksi/segmen jalan sebagai berikut:

1. Seksi I - IC Cibitung sampai dengan IC Telaga Asih – Progres Fisik 100%
2. Seksi II - IC Telaga Asih sampai dengan IC Tambelang – Progres Fisik 100%
3. Seksi III - IC Tambelang sampai dengan IC Tarumajaya – Progres Fisik 100%
4. Seksi IV – IC Tarumajaya sampai dengan IC Cilincing – Progres Fisik 100%

CONSTRUCTION OF THE CILINCING-CIBITUNG TOLL ROAD (JTCC)

The Cilincing-Cibitung Toll Road was constructed primarily to improve port and hinterland connectivity, to connect JTCC with the Kalibaru East Access Road (NPEA), and to reduce the risk of congestion on existing roads. Construction was completed in 2023, and the following sections/segments are now operational:

1. Section I - Cibitung IC to Telaga Asih IC - 100% Physical Progress
2. Section II - Telaga Asih IC to Tambelang IC - 100% Physical Progress
3. Section III - Tambelang IC to Tarumajaya IC - 100% Physical Progress
4. Section IV - Tarumajaya IC to Cilincing IC - 100% Physical Progress

Gambar Seksi II Jalan Tol Cibitung Cilincing
Section II of the Cibitung-Cilincing Toll Road

Gambar Seksi III Jalan Tol Cibitung Cilincing
Section III Cibitung Cilincing Toll Road

Gambar Peresmian Seksi II dan III
Inauguration of Sections II and III

Gambar Seksi IV Jalan Tol Cibitung Cilincing
Section IV of the Cibitung-Cilincing Toll Road

PEMBANGUNAN TERMINAL MULTIPURPOSE LABUAN BAJO – INVESTASI SELESAI

Pengembangan Pelabuhan Labuan Bajo diinisiasi oleh adanya kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia pada 10 Juli 2019, dimana sesuai arahan Presiden, Pelabuhan Labuan Bajo eksisting akan difokuskan sebagai Pelabuhan Pariwisata (penumpang, phinisi, yacht dan cruise), sehingga perlu dilakukan pemindahan/relokasi kegiatan pelayanan barang ke lokasi baru melalui pembangunan Terminal Multipurpose di Wae Kelambu (sesuai dengan penatapan lokasi Terminal Multipurpose Wae Kelambu yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan No: KM 31/2020 tanggal 6 Februari 2020).

Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Sisi Laut dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan dengan kontraktor PT Brantas Abipraya, sementara Pekerjaan Pembanguna Fasilitas Sisi Darat dilaksanakan oleh Pelindo dengan kontraktor PT Wijaya Karya. Fase Pengembangan Awal Terminal Multipurpose telah selesai 100% dan telah diresmikan pada tanggal 14 Oktober 2021.

Sehubungan dengan selesainya pekerjaan fisik, Pelindo telah menyampaikan Surat kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor: PD.05.01/7/6/1/PGPF/UTMA/PLND-22 tanggal 7 Juni 2022 perihal Penyampaian Penyelesaian Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang dilaksanakan oleh Pelindo bahwa Pelindo menyusulkan proyek tersebut dapat dikeluarkan dari daftar Proyek Strategis Nasional para Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021.

LABUAN BAJO MULTIPURPOSE TERMINAL DEVELOPMENT - INVESTMENT COMPLETED

The development of Labuan Bajo Port was initiated by the working visit of the President of the Republic of Indonesia on July 10, 2019. As directed by the President, the existing Labuan Bajo Port will be focused as a tourism port (for passengers, Phinisi boats, yachts, and cruise ships). Therefore, it is necessary to relocate cargo services to a new location through the construction of a multipurpose terminal in Wae Kelambu (in accordance with the location designation for the Wae Kelambu Multipurpose Terminal, as stipulated by the Ministry of Transportation No. KM 31/2020 dated February 6, 2020).

The construction of the seaside facilities is being carried out by the Ministry of Transportation with the contractor PT Brantas Abipraya, while the construction of the landside facilities is being carried out by Pelindo with the contractor PT Wijaya Karya. The initial development phase of the Multipurpose Terminal has been 100% completed and was inaugurated on October 14, 2021.

In connection with the completion of the physical construction, Pelindo submitted a letter to the Coordinating Minister for Economic Affairs Number: PD.05.01/7/6/1/PGPF/UTMA/PLND-22 dated June 7, 2022, regarding the Submission of Completion of the National Strategic Projects by Pelindo. Pelindo requested that the project be removed from the list of National Strategic Projects as stipulated in Republic of Indonesia Coordinating Minister for Economic Affairs Regulation Number 7 of 2021.

Gambar Pembangunan Terminal Multipurpose Labuan Bajo
Construction of the Labuan Bajo Multipurpose Terminal

PEMBANGUNAN FLY OVER DARI DAN MENUJU TERMINAL TELUK LAMONG – INVESTASI SELESAI

Pekerjaan fisik pembangunan *fly over* dari dan menuju Terminal Teluk Lamong telah selesai 100% pada bulan April Tahun 2021. Sehubungan dengan selesainya pekerjaan fisik *fly over* di Tahun 2021 Pelindo telah menyampaikan Surat kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor: PD.05.01/7/6/1/PGPF/UTMA/PLND-22 tanggal 7 Juni 2022 perihal Penyampaian Penyelesaian Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang dilaksanakan oleh Pelindo bahwa Pelindo mengusulkan proyek tersebut dapat dikeluarkan dari daftar Proyek Strategis Nasional pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021.

Sedangkan untuk fisik akses persimpangan *(interchange)* dari dan menuju flyover Terminal Teluk Lamong telah selesai di bangun oleh Pemerintah Kota Surabaya di bulan September Tahun 2022. Selanjutnya, proses pelaksanaan Uji Laik Fungsi Jalan (ULFJ) FlyOver telah memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan administrasi di bulan Desember tahun 2023. Saat ini, sedang proses penerbitan sertifikat laik fungsi jalan (SLFJ) *Fly Over* dari dan menuju Terminal Teluk Lamong oleh Pemerintah Kota Surabaya sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/81/KPTS/013/2023 tanggal 27 Februari 2023 tentang Tim Uji Laik Fungsi Jalan Flyover Teluk Lamong di Kota Surabaya dan Surat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Bina Marga Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan Nomor BM 0301-Be/474 tanggal 25 Maret 2024.

FLYOVER CONSTRUCTION FROM AND TO TELUK LAMONG TERMINAL - INVESTMENT COMPLETED

The physical construction of the flyover to and from the Teluk Lamong Terminal was 100% completed in April 2021. In connection with the completion of the flyover in 2021, Pelindo submitted a letter to the Coordinating Minister for Economic Affairs No. PD.05.01/7/6/1/PGPF/UTMA/PLND-22 dated June 7, 2022, regarding the Submission of Completion of the National Strategic Projects by Pelindo. Pelindo proposed that the project be removed from the list of National Strategic Projects in the Republic of Indonesia Coordinating Minister for Economic Affairs Regulation Number 7 of 2021.

While, the physical access intersection to and from the Teluk Lamong Terminal flyover was completed by the Surabaya City Government in September 2022. In addition, the Roadworthiness Test process is underway, and the Flyover (ULFJ) met the technical and administrative requirements in December 2023. The Surabaya City Government is currently in the process of issuing a Certificate of Roadworthiness (SLFJ) for the Flyover to and from the Teluk Lamong Terminal, in accordance with the Governor of East Java Decree Number 188/81/KPTS/013/2023 dated February 27, 2023, concerning the Teluk Lamong Flyover Roadworthiness Test Team in Surabaya City, and Letter from the Ministry of Public Works and Public Housing, Directorate of Highways, Directorate of Road and Bridge Engineering Number BM 0301-Be/474 dated March 25, 2024.

Gambar Pembangunan Fly Over dari dan menuju Terminal Teluk Lamong
Construction of a flyover to and from Teluk Lamong Terminal

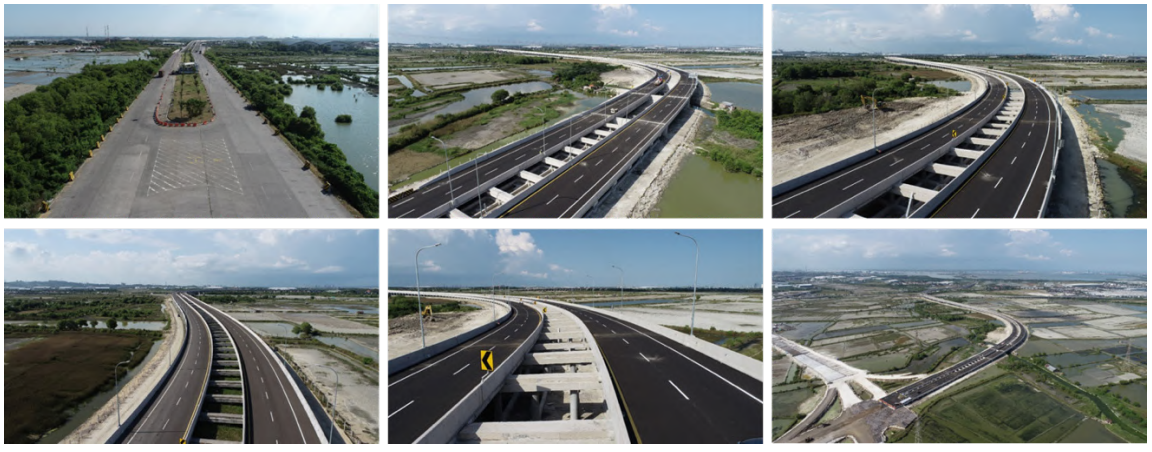

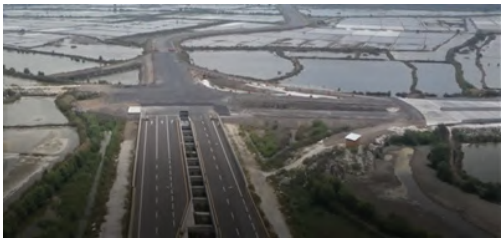

PENGERUKAN ALUR DAN KOLAM PELABUHAN BENOA

Pekerjaan Pengerukan Alur dan Kolam Pelabuhan Benoa sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 telah selesai 100% pada bulan Mei tahun 2025 dan terealisasi sebesar Rp45,17 miliar dari RKAP Tahun 2025. Pekerjaan ini menggunakan dana PMN dan Internal Perusahaan, dimana total nilai investasi yang telah terkontrak dalam kegiatan Pengerukan Alur dan Kolam Pelabuhan Benoa sampai dengan saat ini adalah sebesar Rp1,168 Triliun (tidak termasuk PPN). Adapun rincian pekerjaan Pengerukan Alur dan Kolam Pelabuhan Benoa yaitu sebagai berikut:

1. Pekerjaan *Design and Build* Pengerukan Alur dan Kolam Pelabuhan Benoa Paket A dengan Dana PMN nilai kontrak semula sebesar Rp493.366.500.000,- (empat ratus sembilan puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) termasuk PPN 10% sesuai Surat Perjanjian Nomor: SP2.378/HK.0502/P.III-2021 tanggal 30 September 2021 dilaksanakan oleh Wijaya Karya (Persero).

   Terdapat perubahan/*addendum* kontrak sehingga durasi pekerjaan selama 1.108 Hari Kalender terhitung sejak tanggal Berita Acara Mulai Pekerjaan. Realisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 sebesar Rp448,5 miliar dengan capaian progres fisik telah dinyatakan selesai pada 03 Mei 2025.

   Telah dilakukan serah terima pekerjaan secara keseluruhan sebagaimana Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: PD.05.01/3/5/5/KSTR/BMTH/PLND-25 tanggal 03 Mei 2025.

   Telah terbit Peta Laut Indonesia – Pelabuhan Indonesia 262C pada Bulan Mei 2025 serta 262A dan 262B pada Bulan Juni 2025 oleh Pushidrosal yang telah mengakomodir kondisi kedalaman kolam dan alur Pelabuhan Benoa terbaru.

   Telah dilakukan reviu oleh BPKP Bali terhadap realisasi pembayaran untuk Lingkup *Provisional Sum* sebagaimana Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bali Nomor: PE.12.03/LHP-1103/PW22/4/2025 Tanggal 27 November 2025 perihal Laporan Hasil Reviu Nilai Pembayaran Pekerjaan Provisional Sum pada Pekerjaan Design and Build Pengerukan Alur dan Kolam Pelabuhan Benoa Paket A, dengan hasil reviu nilai akhir lingkup Provisional Sum sebesar Rp6.445.828.698,- (enam milyar empat ratus empat puluh lima milyar delapan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah) belum termasuk PPN.

   Terdapat keterlambatan penyelesaian pekerjaan, sehingga diberlakukan / dikenakan Denda Keterlambatan, sebagaimana Berita Acara Nomor: PD.05.01/9/5/2/KSTR/BMTH/PLND-25 tanggal 09 Mei 2025 telah dilakukan pembahasan dan

BENOA PORT CHANNEL AND POND DREDGING

The Benoa Port Channel and Pond Dredging project was 100% completed in May 2025, with a realized budget of Rp45.17 billion from the 2025 Work Plan and Budget (RKAP). This project used State Capital Investment (PMN) and internal Company funds. The total contracted investment value for the Benoa Port Channel and Pond Dredging project to date is Rp1.168 trillion (excluding VAT). The details of the Benoa Port Channel and Pond Dredging project are as follows:

1. The Design and Build Work for Dredging the Benoa Port Channel and Basin, Package A, with State Capital Investment Funds, with an initial contract value of Rp493,366,500,000 (four hundred ninety-three billion three hundred sixty-six million five hundred thousand rupiah), including 10% VAT, as per Agreement Letter Number: SP2.378/HK.0502/P.III-2021 dated September 30, 2021, will be carried out by Wijaya Karya (Persero).

   There was a contract amendment/addendum, resulting in a work duration of 1,108 calendar days from the date of the Work Commencement Report. Actual costs through QIV 2025 amounted to Rp448.5 billion, with physical progress declared completed on May 3, 2025.

   The overall work handover was carried out as per Work Handover Report Number: PD.05.01/3/5/5/KSTR/BMTH/PLND-25 dated May 3, 2025.

   The Indonesian Sea Map - Indonesian Port 262C was published in May 2025, and 262A and 262B in June 2025 by Pushidrosal, which accommodates the latest basin and channel conditions at Benoa Port.

   The Bali BPKP conducted a review of the payment realization for the Provisional Sum Scope as stated in the Letter of the Bali Provincial Representative Office of the Financial and Development Supervisory Agency Number: PE.12.03/LHP-1103/PW22/4/2025 dated November 27, 2025, concerning the Report on the Review of the Payment Value of the Provisional Sum for the Design and Build Dredging of the Benoa Port Channel and Basin Package A. The final value of the Provisional Sum scope was Rp6,445,828,698 (six billion four hundred forty-five billion eight hundred twenty-eight thousand six hundred ninety-eight rupiah) excluding VAT.

   There was a delay in the completion of the work, so that a Late Completion Fine was imposed as per Minutes Number: PD.05.01/9/5/2/KSTR/BMTH/PLND-25 dated May 9, 2025, a discussion and calculation of the Late Completion Fine amounting to Rp1,844,176,043.86

perhitungan terhadap denda Keterlambatan sebesar Rp1.844.176.043,86 (satu milyar delapan ratus empat puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu empat puluh tiga koma delapan puluh enam rupiah). Bahwa saat ini sedang dilakukan reviu atas nilai Denda Keterlambatan Penyelesaian oleh BPKP pusat.

2. Pekerjaan *Design and Build* Pengerukan Alur dan Kolam Pelabuhan Benoa Paket B dengan Dana PMN nilai kontrak semula sebesar Rp641.025.000.000,- (enam ratus empat puluh satu milyar dua puluh lima juta rupiah) termasuk PPN 10% sesuai Surat Perjanjian Nomor: SP2.373/HK.0502/P.III-2021 tanggal 30 September 2021 dilaksanakan oleh PT Pembangunan Perumahan (Persero).

   Terdapat perubahan addendum kontrak sehingga terdapat perubahan Nilai Pekerjaan akibat perubahan volume pengerukan (Dana PMN) dan penambahan lingkup pekerjaan (anggaran Internal Perusahaan), Nilai Total Pekerjaan menjadi sebesar Rp599.893.014.408,- (lima ratus sembilan puluh sembilan milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta empat belas ribu empat ratus delapan) tidak termasuk PPN, dengan uraian menjadi sebagai berikut:
   a. Dana PMN (Lingkup Pengerukan, Lingkup Perkuatan Yacht Club, serta Lingkup Provisonal Sum) sebesar Rp580.833.714.408,- (lima ratus delapan puluh milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu empat ratus delapan) tidak termasuk PPN
   b. Anggaran Internal Perusahaan (Lingkup Wreck Removal) sebesar Rp19.059.300.000,- (sembilan belas milyar lima puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) (Penugasan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi)

Bahwa durasi pekerjaan selama 893 Hari Kalender terhitung sejak tanggal Berita Acara Mulai Pekerjaan Lingkup Perkuatan Kolam Marina Yacht. Realisasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 mencapai Rp582,75 miliar dengan capaian progres fisik telah dinyatakan selesai pada 15 Agustus 2024.

Terdapat reviu nilai pembayaran pada Lingkup Provisional oleh BPKP Bali sebagaimana Surat PE.12.03/LHP-1054/PW22/4/2024 tanggal 24 Desember 2024 perihal Laporan Hasil Reviu Nilai Pembayaran Pekerjaan *Provisional Sum* pada Pekerjaan Design and Build Pengerukan Alur dan Kolam Pelabuhan Benoa Paket B, sehingga total realisasi pembayaran sebesar Rp633.362.307.493,- (enam ratus tiga puluh tiga milyar tiga ratus enam puluh dua juta tiga ratus tujuh ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah), dengan uraian:

1. Dana PMN (Lingkup Pengerukan, Lingkup Perkuatan *Yacht Club*, serta Lingkup Provisonal Sum) sebesar Rp612.206.484.492,- (enam ratus dua belas triliun dua ratus enam miliar empat ratus delapan puluh empat

(one billion eight hundred forty-four million one hundred seventy-six thousand forty-three point eighty-six rupiah) was conducted. Currently tehere is a review of the Late Completion Fine value being conducted by the central BPKP.

2. The Benoa Harbor Channel and Basin Dredging Design and Construction Package B project, with State Capital Investment Funds, was initially valued at IDR 641,025,000,000 (six hundred forty-one billion twenty-five million rupiah), including 10% VAT, as per Agreement Letter Number: SP2.373/HK.0502/P.III-2021 dated September 30, 2021, and was executed by PT Pembangunan Perumahan (Persero).

   There was a change in the contract addendum, resulting in a change in the Work Value due to changes in the dredging volume (PMN Funds) and additional work scope (Internal Company Budget). The Total Work Value is now IDR 599,893,014,408 (five hundred ninety-nine billion eight hundred ninety-three million fourteen thousand four hundred and eight) excluding VAT, with the following breakdown:

   a. PMN Funds (Dredging Scope, Yacht Club Reinforcement Scope, and Provisional Sum Scope) amounting to Rp580,833,714,408 (five hundred eighty billion eight hundred thirty-three million seven hundred fourteen thousand four hundred and eight) excluding VAT
   b. The Company's Internal Budget (Wreck Removal Scope) is Rp19,059,300,000 (nineteen billion fifty-nine million three hundred thousand rupiah) (Assigned by the Coordinating Ministry for Maritime Affairs and Investment).

The work duration is 893 calendar days, calculated from the date of the Commencement Minutes for the Marina Yacht Pool Reinforcement Scope. Realization up to the QIII 2025 reached Rp582.75 billion, with physical progress declared complete on August 15, 2024.

The Bali BPKP (Financial Development Supervisory Agency) reviewed the payment amount within the Provisional Scope, as outlined in Letter PE.12.03/LHP-1054/PW22/4/2024 dated December 24, 2024, concerning the Report on the Review of the Provisional Sum Payment Amount for the Design and Build Dredging of the Benoa Port Channel and Basin Package B. The total realized payment amounted to Rp633,362,307,493 (six hundred thirty-three billion three hundred sixty-two million three hundred seven thousand four hundred ninety-three rupiah), with the following details:

3. State Capital Investment (Dredging, Yacht Club Reinforcement, and Provisional Sum) amounting to Rp612,206,484,492 (six hundred twelve trillion two hundred six billion four hundred eighty-four million

juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) termasuk PPN 10 % dan 11%

2. Anggaran Internal Perusahaan (Lingkup *Wreck Removal*) sebesar Rp21.155.823.000,- (dua puluh satu miliar seratus lima puluh lima juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) termasuk PPN 11%

Telah dilakukan serah terima pekerjaan secara keseluruhan sebagaimana Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: PD.05.01/3/12/3/KSTR/BMTH/PLND-24 tanggal 03 Desember 2024.

four hundred ninety-two thousand rupiah) including 10% and 11% VAT.

4. Internal Company Budget (Wreck Removal) amounting to Rp21,155,823,000 (twenty-one billion one hundred fifty-five million eight hundred twenty-three thousand rupiah) including 11% VAT.

The overall handover of the work has been carried out as outlined in the Work Handover Report Number: PD.05.01/3/12/3/KSTR/BMTH/PLND-24 dated December 3, 2024.

Gambar Pengerukan Alur dan Kolam Paket A
Channel and Pond Dredging Package A

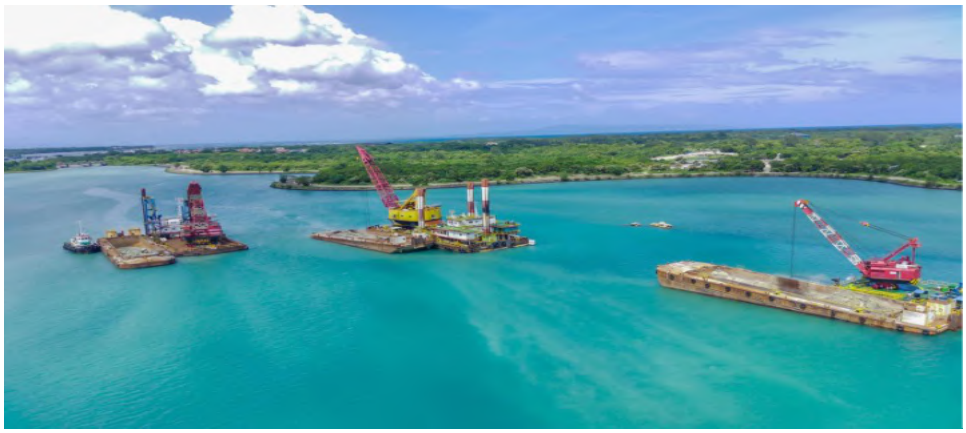

Gambar Pengerukan Alur dan Kolam Paket B
Channel and Pond Dredging Package B

Atas penyelesaian Pekerjaan Pengerukan Pelabuhan Benoa telah diterbitkan Peta Laut Indonesia – Pelabuhan Benoa dengan uraian:

1. Peta Laut Indonesia - Pelabuhan Benoa Nomor 262C edisi 22 Mei 2025 (*Notice to Marine Corrections up to Week* 19 - 2025).

Following the completion of the Benoa Port Dredging Work, a Indonesian Maritime Chart - Benoa Port has been published, with the following details:

1. ndonesian Maritime Chart - Benoa Port Number 262C, May 22, 2025 edition (Notice to Marine Corrections up to Week 19 - 2025).

2. Peta Laut Pelabuhan Indonesia - Benoa Nomor 262A edisi 07 Juni 2025 (*Notice to Marine Corrections up to Week* 23 - 2025).
3. Peta Laut Pelabuhan Indonesia - Benoa Nomor 262B edisi 18 Februari 2025 (Notice to Marine (NM): 2025 -09/087, *printed*: 2).

2. Indonesian Maritime Chart - Benoa Port Number 262A, June 7, 2025 edition (Notice to Marine Corrections up to Week 23 - 2025).
3. Indonesian Maritime Chart - Benoa Port Number 262B, February 18, 2025 edition (Notice to Marine (NM): 2025-09/087, printed: 2).

Gambar Peta Laut Indonesia - Pelabuhan Indonesia
Indonesian Maritime Map - Indonesian Ports

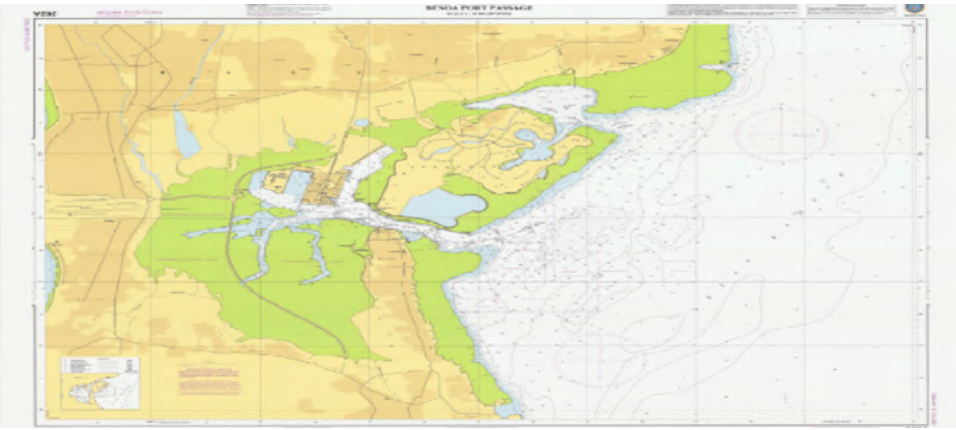

PENGEMBANGAN PELABUHAN KUPANG

Pekerjaan pengembangan Pelabuhan Kupang merupakan Proyek Strategis Nasional yang terdiri dari 14 pekerjaan telah selesai seluruhnya pada tahun 2022. Adapun pekerjaan-pekerjaan dimaksud yaitu sebagai berikut:

1. Perbaikan Dermaga Lokal dan Nusantara Di Pelabuhan Tenau Kupang
2. Perkuatan Dermaga Ippi
3. Perkuatan Dermaga di Waingapu
4. Perkuatan Dermaga di Kalabahi
5. Pembangunan Lapangan Penumpukan 1 Ha di Pelabuhan Ippi
6. Perkerasan CY CCC-CDC di Pelabuhan Tenau Kupang
7. Perkerasan Lapangan 5500 m2 di Pelabuhan Ende
8. Perkuatan Dermaga Lama 100 x 14.25 dan Penambahan Lampu di Dermaga Eks. APBN di Ende
9. Pembangunan Terminal Penumpang di Ende
10. Pembangunan Terminal Penumpang di Ippi
11. Pembangunan Jalan Akses Alternatif ± 200 di Ippi
12. Pembangunan Gate dan Penerangan Jalan di Waingapu
13. Pembangunan Terminal Penumpang di Waingapu
14. Rehabilitasi Terminal Penumpang di Kupang

KUPANG PORT DEVELOPMENT

The Kupang Port development project is a National Strategic Project consisting of 14 projects, all of which were completed in 2022. The projects wre as follows:

1. Repair of Local and Nusantara Piers at Tenau Port, Kupang
2. Reinforcement of Ippi Pier
3. Reinforcement of Piers in Waingapu
4. Reinforcement of Piers in Kalabahi
5. Construction of a 1-hectare Stacking Yard at Ippi Port
6. Paving of the CCC-CDC CY at Tenau Port, Kupang
7. Paving of a 5,500 m2 Field at Ende Port
8. Reinforcement of the Old Pier (100 x 14.25) and Addition of Lighting to the Existing Pier. State Budget in Ende
9. Construction of the Passenger Terminal in Ende
10. Construction of the Passenger Terminal in Ippi
11. Construction of an Alternative Access Road of approximately 200 km in Ippi
12. Construction of Gates and Street Lighting in Waingapu
13. Construction of the Passenger Terminal in Waingapu
14. Rehabilitation of the Passenger Terminal in Kupang

Gambar Dokumentasi Pengembangan Pelabuhan Kupang
Kupang Port Development Documentation

PENGEMBANGAN PELABUHAN SORONG

Pengembangan Pelabuhan Sorong tahun 2024 yaitu terdapat Pekerjaan Pembangunan CY di Pelabuhan Sorong. Triwulan IV Tahun 2024 terealisasi Rp35,271 miliar dari RKAP Tahun 2024 sebesar Rp39,5 miliar. Sebelumnya pembangunan fisik CY telah dimulai namun dalam pelaksanaannya mengalami kesulitan finansial akibat Covid 19, dimana dilakukan pemutusan kontrak tanggal 22 Juni 2021 dengan progres terakhir 14,02%. Secara kontraktual, pekerjaan direncanakan akan selesai pada tahun 2024. Selanjutnya pekerjaan dilanjutkan kembali dan kontrak diterbitkan tanggal 20 Desember 2023. Pelaksanaan pekerjaan dimulai tanggal 5 Januari 2024 dan saat ini progres pekerjaan mencapai 100%.

SORONG PORT DEVELOPMENT

The development of Sorong Port in 2024 includes the construction of a water supply facility (CY) at Sorong Port. In QIV 2024, Rp35.271 billion was realized, out of the 2024 Work Plan and Budget (RKAP) of Rp39.5 billion. Physical construction of the CY had previously begun, but due to financial difficulties due to COVID-19, the contract was terminated on June 22, 2021, with a final progress of 14.02%. Contractually, the work was scheduled for completion in 2024. Work was then resumed, and the contract was issued on December 20, 2023. Work commenced on January 5, 2024, and progress is currently 100%.

Gambar Pekerjaan Pembangunan CY di Pelabuhan Sorong
CY Construction Work at Sorong Port

PENGEMBANGAN PELABUHAN KUALA TANJUNG – INVESTASI SELESAI

Pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung telah selesai

KUALA TANJUNG PORT DEVELOPMENT - INVESTMENT COMPLETED

The construction of Kuala Tanjung Port has been completed.

Gambar Pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung
Kuala Tanjung Port Development

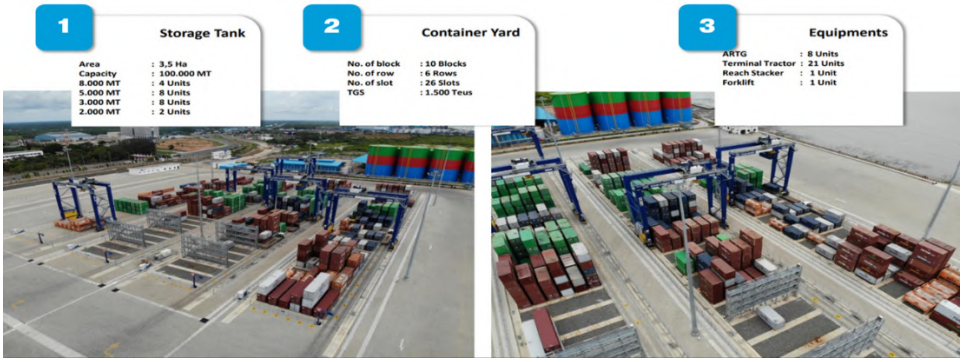

PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI KUALA TANJUNG

Untuk tahun 2025, pengembangan Kawasan Industri Kuala Tanjung ditargetkan untuk dapat melakukan pembangunan Gate dan jalan masuk Kawasan Industri Kuala Tanjung, dan melakukan sertifikasi lahan serta pemberlakuan efektif dari Izin Usaha Kawasan Industri. Sampai dengan Triwulan IV tahun 2025 telah terserap anggaran sebesar Rp53,5 miliar atau sebesar 93,23% dari total anggaran tahun 2025 sebesar Rp57,40 miliar.

Adapun penjelasan investasi hingga Triwulan IV Tahun 2025 antara lain:

1. Pengembangan Kawasan Industri Kuala Tanjung.
   a. Telah diselesaikan dokumen teknis pekerjaan *Gate* dan Jalan Masuk KIKT.
   b. Telah diperoleh persetujuan untuk dokumen teknis.
   c. Telah dilakukan pengumuman pelelangan pekerjaan Gate dan Jalan Masuk pada tanggal 25 Maret 2025.

KUALA TANJUNG INDUSTRIAL AREA DEVELOPMENT

For 2025, the development of the Kuala Tanjung Industrial Area was targeted to include the construction of a gate and access road, land certification, and the effective implementation of the Industrial Area Business Permit. As of QIV 2025, Rp53.5 billion has been spent, representing 93.23% of the total 2025 budget of Rp57.40 billion.

The investment details for QIV 2025 included:

1. Development of the Kuala Tanjung Industrial Estate.
   a. The technical documents for the KIKT Gate and Entrance work have been completed.
   b. Approval for the technical documents has been obtained.
   c. The tender for the Gate and Entrance work was announced on March 25, 2025.

d. Telah ditandatangani kontrak dan BAMK pekerjaan Pembangunan *Gate* dan Jalan Masuk pada tanggal 17 Juni 2025. Progress pelaksanaan sampai akhir September 2025 adalah sebesar 68%.
e. Telah ditandatangani kontrak dan BAMK pekerjaan pengawasan Pembangunan *Gate* dan Jalan Masuk KIKT pada 01 Juli 2025.
f. Telah selesai dilaksanakan pembangunan *Gate* dan Jalan Masuk di Kawasan Industri Kuala Tanjung pada bulan Desember 2025.

d. The contract and BAMK for the Gate and Entrance Road construction work was signed on June 17, 2025. Progress as of the end of September 2025 was 68%.
e. The contract and BAMK for the supervision of the KIKT Gate and Entrance Road construction work were signed on July 1, 2025.
f. The gate and entrance road construction work in the Kuala Tanjung Industrial Estate was completed in December 2025.

Gambar Progres Pembangunan Kawasan Industri Kuala Tanjung
Kuala Tanjung Industrial Estate Development Progress

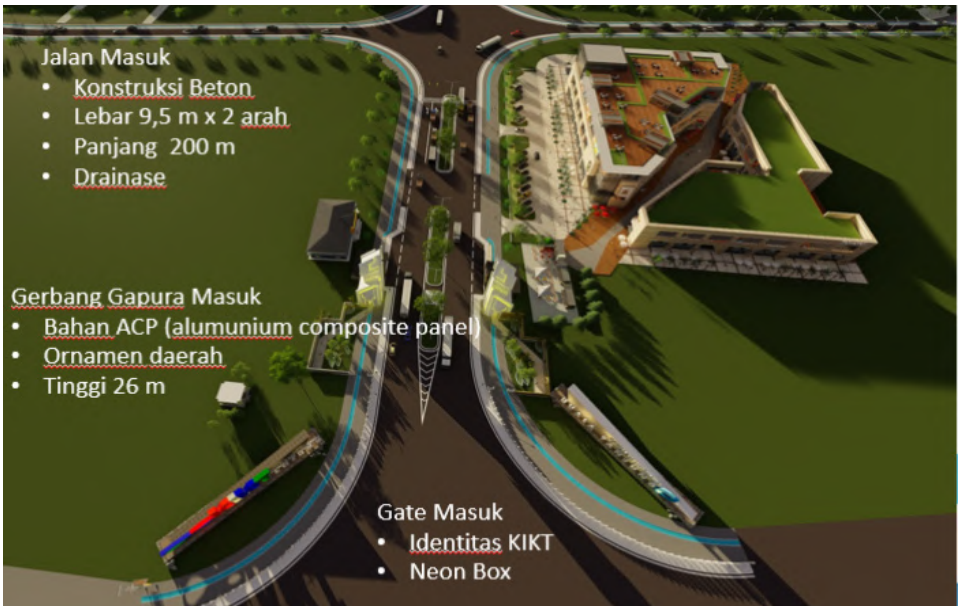

EGIATAN
PEKERJAAN GATE DAN JALAN MASUk KAWASAN INDUSTRI KUALA TANJUNG (sta 0+000
TEM PEKERJAAN
coran k 100 lantai kerja, Lc di atas base A
OKASI
sta 0+045

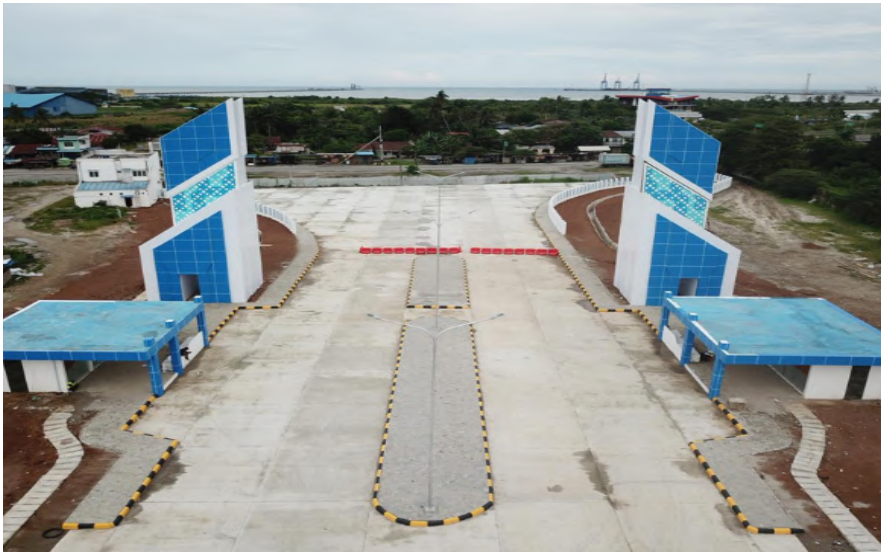

2. Pekerjaan Pengamanan Aset dan Sertifikasi Lahan
   a. Telah dilaksanakan pengukuran lahan oleh BPN Kanwil Sumut untuk proses sertifikasi lahan.
   b. Telah terbit sertifikat HGB atas nama PT Prima Pengembangan Kawasan sebanyak 31 persil.
   c. Saat ini sedang dilaksanakan pendaftaran untuk tahap II sebanyak 26 persil.

LAPORAN PENGGUNAAN TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA (PMN)

Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, Tambahan Penyertaan Modal Negara (PNM) adalah pemisahan kekayaan negara dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dijadikan modal BUMN dan/atau Perseroan Terbatas dan dikelola secara korporasi. Sesuai ketentuan pada Pasal 110 PER-2/MBU/03/2023:

1. (1) Tambahan PMN dilakukan dengan tujuan untuk:
   a. Memperbaiki struktur permodalan BUMN atau Perseroan Terbatas; dan/atau
   b. Meningkatkan kapasitas usaha BUMN atau Perseroan Terbatas.
2. (2) Tambahan PMN kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam rangka:
   a. Melaksanakan penugasan Pemerintah kepada BUMN;
   b. Melakukan restrukturisasi dan/atau penyelamatan BUMN; dan/atau
   c. Melakukan pengembangan usaha BUMN

Berikut informasi Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Pelindo.

2. Asset Security and Land Certification Work
   a. Land measurements were carried out by the North Sumatra National Land Agency (BPN) Regional Office for the land certification process.
   b. HGB certificates were issued in the name of PT Prima Pengembangan Kawasan for 31 plots.
   c. Phase II registration for 26 plots is currently underway.

REPORT ON THE USE OF ADDITIONAL STATE CAPITAL PARTICIPATION

Based on the Republic of Indonesia Minister of State-Owned Enterprises of Regulation the Number PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, Additional State Capital Participation (PNM) is the separation of state assets from the state revenue and expenditure budget, which is used as capital for State-Owned Enterprises (BUMN) and/or Limited Liability Companies and managed as a corporation. According to the provisions in Article 110 of PER-2/MBU/03/2023, it included:

1. (1) Additional PMN is provided for the following purposes:
   a. Improving the capital structure of State-Owned Enterprises (BUMN) or Limited Liability Companies; and/or
   b. Increasing the business capacity of State-Owned Enterprises (BUMN).
2. (2) Additional PMN to BUMNs as referred to in paragraph (1) is used for:
   a. Carrying out government assignments to BUMNs;
   b. Restructuring and/or rescuing BUMNs; and/or
   c. Developing State-Owned Enterprises (SOEs)

The following is information on the use of Pelindo's Additional State Capital Participation (PMN).

PEKERJAAN PENGERUKAN ALUR DAN KOLAM PELABUHAN BENOA

Tambahan dana PMN yang diterima Pelindo direncanakan digunakan untuk melanjutkan pekerjaan pengerukan alur dan kolam Pelabuhan Benoa dalam rangka pengembangan Bali Maritime Tourism Hub (BMTH). Alokasi tambahan PMN untuk pekerjaan lanjutan pengerukan alur dan kolam Pelabuhan Benoa adalah sebesar Rp1,20 triliun dan akan dilaksanakan secara multiyear sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini.

BENOA PORT CHANNEL AND POND DREDGING WORK

The additional State Capital Investment (PMN) funds received by Pelindo are planned to be used to continue the dredging work at Benoa Port's channel and pond as part of the development of the Bali Maritime Tourism Hub (BMTH). The additional PMN allocation for the continued dredging of the Benoa Port channel and pond is Rp1.20 trillion and will be executed on a multi-year basis from 2021 onward.

Tabel Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perusahaan Penerima Tambahan PMN Triwulan IV Tahun 2025
Realization of Additional State Capital Participation (PMN) in State-Owned Enterprises and Companies Receiving Additional PMN in QIV 2025

No.	Kegiatan Activities	Tanggal Pencairan Disbursement Date	Nilai PMN (Rp Juta) Amount (Rp Million)
1	2	3	4
1	Pekerjaan Pengerukan Alur dan Kolam Pelabuhan Benoa Benoa Harbor Channel and Basin Dredging Work	23 September 2021 23 September 2021	1.200.000
a.	Pekerjaan *Design and Build* Pengerukan Alur dan Kolam Pelabuhan Benoa Paket A Design and Build Work for Dredging the Benoa Harbor Channel and Basin, Package A	-	-
b.	Pekerjaan *Design and Build* Pengerukan Alur dan Kolam Pelabuhan Benoa Paket B Design and Build Work for Dredging the Benoa Harbor Channel and Basin, Package B	-	-
c.	Pembayaran Pajak Penghasilan Income Tax Payment	-	-
	Jumlah		**1.200.000**

	Realisasi Keuangan Penggunaan Tambahan PNM Tahun 2025 (Rp juta) Financial Realization of Additional PMN in 2025 (Rp million)				Realisasi Fisik Penggunaan Tambahan PMN Physical Realization of Additional PMN National			
	Sampai dengan Triwulan I Triwulan I Until QI	**Sampai dengan Triwulan II** II Until QII	**Sampai dengan III** III Until QIII	**Sampai dengan Triwulan IV**	**Sampai dengan Triwulan I** IV Until QIV	**Sampai dengan Triwulan II** II Until QII	**Sampai dengan Triwulan III** Until QIII	**Sampai dengan Triwulan IV** IV Until QIV
	5	6	7	8	9	10	11	**12**
	-	-	-	-	-	-	-	-
	388.852	388.852	461.295	461.295	97,72%	100,00%	100,00%	100,00%
	595.625	597.466	597.466	597.466	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	23.626	24.579	24.579	26.396	-	-	-	-
	1.008.103	**1.010.897**	**1.083.340**	**1.085.157**	**99,01%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**

Tabel Laporan Realisasi Capaian Kinerja Penyertaan Modal Negara (PMN) Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perusahaan Penerima Tambahan PMN Triwulan IV Tahun 2024
Realization of State Capital Participation (PMN) Performance Achievements in State-Owned Enterprises and Companies Receiving Additional PMN, QIV 2025

No	KPI	Formula	Target Tahun 2024 2024 Target	Realisasi Progres Progress Realization
A	***OUTPUT***			
1	Akumulasi Progres Proyek Pengerukan dan Dinding Penahan Tanah *(Revetment Wall)* Accumulated Progress of Dredging and Retaining Wall Projects	(Realisasi *progress* pekerjaan pengerukan/Rencana progres pekerjaan Pengerukan) X 100% Realized dredging progress/ Planned dredging progress) X 100%	100,00%	100,00%
2	Akumulasi Penyerapan Dana PMN Accumulated PMN Fund Absorption	(Realisasi Penyerapan PMN/ Kontrak Pekerjaan PMN) X 100% (Realized PMN Absorption/PMN Work Contract) X 100%	100,00%	90,43%
B	**OUTCOME/MANFAAT** OUTCOMES/BENEFITS			
1	Jumlah Kunjungan Kapal *Cruise* Number of Cruise Ship Visits	Jumlah kunjungan kapal Number of ship visits	52 Kapal 52 Ships	65 Kapal 65 Ships
2	Penyerapan Mitra UKMM SME Partner Absorption	Jumlah Unit *Stand* Mitra UKMM Number of UKM Partner Booths	80 Unit Stand	103 *Unit Stand*
3	Kontribusi Pendapatan BMTH BMTH Revenue Contribution	Pendapatan BMTH BMTH Revenue	Rp135,38 miliar Rp135.38 billion	Rp214,54 miliar Rp214.54 billion
4	Jumlah Wisatawan Luar Negeri Number of Foreign Tourists	Jumlah Wisatawan Number of Tourists	59.500 orang 59,500 people	146.195 orang 146,195 people

FOTO PROGRESS PELAKSANAAN PER KEGIATAN/PROYEK DI LAPANGAN

PHOTOGRAPHS OF FIELD PROGRESS OF ACTIVITIES/PROJECTS

DOKUMENTASI PEKERJAAN PENGERUKAN PAKET A

Progres pelaksanaan Pengerukan Paket A di lapangan (Dokumentasi diambil pada periode sampai dengan 21 Desember 2025.

DOCUMENTATION OF PACKAGE A DREDGING WORK

Progress of Package A dredging in the field (Documentation taken up to December 21, 2025).

Gambar Pengerjaan Pengerukan Di Kolam Putar
Dredging Work in the Turning Basin

Gambar Pekerjaan Pengerukan di Kolam Dermaga Timur (curah cair, gas, dan petikemas)
Dredging Work in the Turning Basin

DOKUMENTASI PEKERJAAN PENGERUKAN PAKET B

Progres pelaksanaan Pengerukan Paket B di lapangan.

DOCUMENTATION OF PACKAGE B DREDGING WORK

Progress of Package B dredging in the field

Gambar Kegiatan Proses Penerbitan Peta Laut serta Dokumen Peta Laut.
Activities for the Nautical Chart Publishing Process and Nautical Chart Documents.

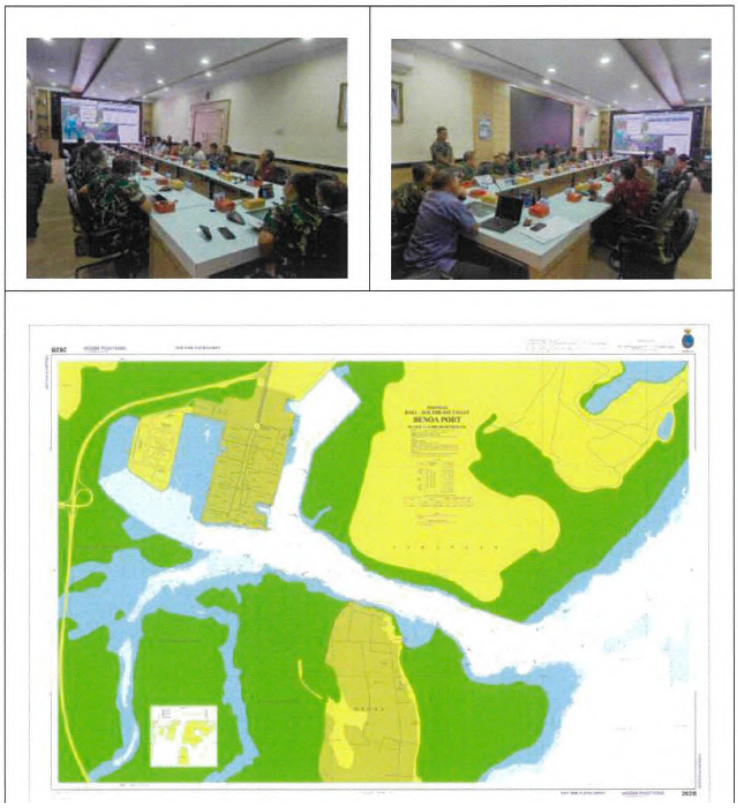

PROGRESS PEKERJAAN PENGERUKAN ALUR DAN KOLAM PELABUHAN BENOA

Kegiatan Pekerjaan Pengerukan Alur dan Kolam Pelabuhan Benoa

1. Total Investasi yang diperlukan
   Total nilai investasi yang telah terkontrak dalam kegiatan Pengerukan Alur dan Kolam Pelabuhan Benoa sampai dengan saat ini adalah sebesar Rp1 .134.391 .500.000,- (satu triliun seratus tiga puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) termasuk PPN, yang terdiri dari:
   a. Pekerjaan *Design and Build* Pengerukan Alur dan Kolam Pelabuhan Benoa Paket A sebesar Rp493.366.500.000,- (empat ratus sembilan puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) termasuk PPN, sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor: SP2.378/HK.0502/P.III-2021 tanggal 30 September 2021, jo. Addendum I Nomor: PD.01/21/11/2/ADPG/INVS/PLND-22 tanggal 21 November 2022, jo. Addendum II Nomor: PD.01/20/3/1/SPGD/INVS/PLND-23 tanggal 20 Maret 2023, jo. Addendum III Nomor: PD.01/10/11/4/SPGD/BMTH/PLND-23 tanggal 10 November 2023, jo. Addendum IV Nomor: PD.01/4/12/4/SPGD/BMTH/PLND-23 tanggal 04 Desember 2023, jo. Addendum V Nomor: PD.01/15/7/6/SPGD/BMTH/PLND-24 tanggal 15 Juli 2024, jo. (Addendum) VI Nomor: PD.01/2/10/2/SPGD/BMTH/PLND-24 tanggal 02 Oktober 2024 dilaksanakan oleh PT Wijaya Karya (Persero) dengan durasi 1.108 Hari Kalender terhitung sejak tanggal Berita Acara Mulai Pekerjaan.

   b. Pekerjaan *Design and Build* Pengerukan Alur dan Kolam Pelabuhan Benoa Paket B sebesar Rp641.025.000.000,- (enam ratus empat puluh satu miliar dua puluh lima juta rupiah) termasuk PPN, sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor SP2.373/HK.0502/P.III-2021 tanggal 30 September 2021, jo. Addendum I Nomor: PD.01/1/2/1/ADPG/INVS/PLND-23 tanggal 1 Februari 2023, jo. Addendum II Nomor: PD.01/20/3/1/SPGD/INVS/PLND-23 tanggal 20 Maret 2023, jo. Addendum III Nomor: PD.01/10/11/2/SPGD/BMTH/PLND-23 tanggal 10 November 2023, jo. Addendum IV Nomor: PD.01/6/12/2/SPGD/BMTH/PLND-23 tanggal 06 Desember 2023, jo. (Addendum) V Nomor: PD.01/15/7/8/SPGD/BMTH/PLND-24 tanggal 15 Juli 2024 dilaksanakan oleh PT Pembangunan Perumahan (Persero) dengan durasi 893 Hari Kalender terhitung sejak tanggal Berita Acara Mulai Pekerjaan Lingkup Pengerukan, serta Perjanjian Penyelesaian Nomor: PD.01/2/12/1/KSTR/INVS/PLND-24 tanggal 02 Desember 2024 tentang tentang Administrasi Pada Perjanjian Pemborongan Nomor SP2.373/Hk.0502/P.III- 2021 tanggal 30

PROGRESS OF BENOA PORT CHANNEL AND POND DREDGING WORK

Benoa Port Channel and Pond Dredging Work Activities

1. Total Investment Required
   The total contracted investment for Benoa Port Channel and Pond Dredging activities to date is Rp1,134,391,500,000 (one trillion one hundred thirty-four billion three hundred ninety-one million five hundred thousand rupiah) including VAT, consisting of:

   a. Design and Build Work for Dredging of Benoa Port Channel and Pool Package A amounting to Rp493,366,500,000,- (four hundred ninety-three billion three hundred sixty-six million five hundred thousand rupiah) including VAT, in accordance with the Agreement Letter Number: SP2.378/HK.0502/P.III-2021 dated September 30, 2021, jo. Addendum I Number: PD.01/21/11/2/ADPG/INVS/PLND-22 dated November 21, 2022, jo. Addendum II Number: PD.01/20/3/1/SPGD/INVS/PLND-23 dated March 20, 2023, jo. Addendum III Number: PD.01/10/11/4/SPGD/BMTH/PLND-23 dated November 10, 2023, jo. Addendum IV Number: PD.01/4/12/4/SPGD/BMTH/PLND-23 dated December 4, 2023, in conjunction with Addendum V Number: PD.01/15/7/6/SPGD/BMTH/PLND-24 dated July 15, 2024, in conjunction with (Addendum) VI Number: PD.01/2/10/2/SPGD/BMTH/PLND-24 dated October 2, 2024, implemented by PT Wijaya Karya (Persero) for a duration of 1,108 calendar days from the date of the Work Commencement Report.
   b. Design and Build Work for Dredging of Benoa Port Channel and Pool Package B amounting to Rp641,025,000,000,- (six hundred forty one billion twenty five million rupiah) including VAT, in accordance with the Agreement Letter Number SP2.373/HK.0502/P.III-2021 dated September 30, 2021, in conjunction with Addendum I Number: PD.01/1/2/1/ADPG/INVS/PLND-23 dated February 1, 2023, in conjunction with Addendum II Number: PD.01/20/3/1/SPGD/INVS/PLND-23 dated March 20, 2023, in conjunction with Addendum III Number: PD.01/10/11/2/SPGD/BMTH/PLND-23 dated November 10, 2023, in conjunction with Addendum IV Number: PD.01/6/12/2/SPGD/BMTH/PLND-23 dated December 6, 2023, in conjunction with (Addendum) V Number: PD.01/15/7/8/SPGD/BMTH/PLND-24 dated July 15, 2024, implemented by PT Pembangunan Perumahan (Persero) with a duration of 893 Calendar Days calculated from the date of the Minutes of Commencement of Dredging Scope Work, as well as the Completion Agreement Number: PD.01/2/12/1/KSTR/INVS/PLND-24 dated December 2, 2024, concerning

September 2021 tentang Pekerjaan *Design and Build* Pengerukan Alur Dan Kolam Pelabuhan Benoa Paket B serta Perubahannya.

2. Total Tambahan PMN yang dialokasikan
   Total tambahan PMN yang dialokasikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III Pasal 2 ayat (1) adalah sebesar Rp1.200.000.000.000,- (satu triliun dua ratus miliar rupiah)
3. Penjelasan Progres Pekerjaan PMN
   Progres Fisik pada kegiatan Pengerukan Alur danKolam Pelabuhan Benoa adalah sebagai berikut:
   a. Progres Fisik untuk Pekerjaan Design and Build Pengerukan Alur dan Kolam Pelabuhan Benoa Paket A sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 berdasarkan Laporan Progress Mingguan ke-160 oleh Kontraktor Pelaksana dan dievaluasi Konsultan Manajemen Konstruksi, (periode 15 Desember 2024 sampai dengan 21 Desember 2024) mencapai 89,928%.
   b. Progres Fisik untuk Pekerjaan Design and Build Pengerukan Alur dan Kolam Pelabuhan Benoa Paket B sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 tanggal 15 Agustus 2024 telah dinyatakan selesai dengan nilai final pekerjaan pengerukan sebesar Rp550.833.714.408,- (lima ratus lima puluh miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu empat ratus delapan rupiah). Telah terbit Peta Laut oleh Pushidrosal untuk Pekerjaan Design and Build Pengerukan Alur dan Kolam Pelabuhan Benoa Paket B sebagaimana Berita Acara Nomor: B/625/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024.

Secara kumulatif, sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024, total progres fisik Pekerjaan Pengerukan Alur dan Kolam Pelabuhan Benoa mencapai 95,619% dari target KPI PMN Triwulan IV Tahun 2024 akumulasi progress proyek pengerukan sebesar 100,000%.

KENDALA DAN RISIKO YANG DIHADAPI

Pada Pekerjaan Keruk Paket A, produktivitas alat keruk kurang maksimal akibat dari sebaran material keras di area kolam curah cair, gas, dan petikemas.

RENCANA TIDAK LANJUT

Rencana dan tindak lanjut Kegiatan Pekerjaan Pengerukan Alur dan Kolam Pelabuhan Benoa yaitu:

1. Terkait revisi Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Benoa, saat ini telah ditandatangani oleh Menteri Perhubungan pada tanggal 31 Maret 2023 Nomor KM 27 Tahun 2023.
2. Dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) area Pembuangan/ Pengaliran Limbah Material Keruk telah terbit sesuai Nomor 09112310515100008 tanggal 9 November 2023.

the Administration of Contract Agreement Number SP2.373/Hk.0502/P.III-2021 dated September 30, 2021, concerning the Design and Build Work of Dredging the Benoa Port Channel and Basin Package B and its Amendments.

2. Total Additional PMN Allocated
   The total additional PMN allocated based on Government Regulation No. 92 of 2021 concerning the Additional Capital Participation of the Republic of Indonesia into the Share Capital of the Limited Liability Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III, Article 2 paragraph (1), was Rp1,200,000,000,000 (one trillion two hundred billion rupiah).
3. Explanation of PMN Work Progress
   The physical progress of the Benoa Port Channel and Pool Dredging activities is as follows:
   a. Physical progress for the Design and Build Dredging of the Benoa Port Channel and Basin, Package A, up to QIV 2024, based on the 160th Weekly Progress Report by the Implementing Contractor and evaluated by the Construction Management Consultant, (period December 15, 2024, to December 21, 2024), and has reached 89.928%.
   b. Physical progress for the Design and Build Dredging of the Benoa Port Channel and Basin, Package B, up to QIV 2024, dated August 15, 2024, has been declared complete, with a final dredging value of Rp550,833,714,408 (five hundred fifty billion eight hundred thirty-three million seven hundred fourteen thousand four hundred and eight rupiah). The Marine Map has been issued by Pushidrosal for the Design and Build Work of Benoa Port Channel and Basin Dredging Package B, as per Minutes Number: B/625/XII/2024 dated December 11, 2024.

Cumulatively, as of QIV 2024, the total physical progress of the Benoa Port Channel and Basin Dredging Work has reached 95.619% of the KPI target for QIV 2024, with an accumulated dredging project progress of 100,000%.

OBSTACLES AND RISKS FACED

Dredging Package A resulted in suboptimal dredging equipment productivity due to the spread of hard material in the liquid, gas, and container bulk basin areas.

NOT PROCEEDING

The plan and follow-up for the Benoa Port Channel and Basin Dredging Work are as follows:

1. Regarding the revision of the Benoa Port Master Plan (RIP), it was signed by the Minister of Transportation on March 31, 2023, under Decree No. KM 27 of 2023.
2. The Marine Spatial Utilization Activity Conformity Approval Document (PKKPRL) for the Dredged Material Waste Disposal/Discharge Area has been issued under Decree No. 09112310515100008 dated November 9, 2023.

3. Telah dikeluarkan Persetujuan Kerja Keruk (PK3) Tahap II oleh Kementerian Perhubungan untuk pelaksanaan pengerukan terhadap sisa volume pekerjaan. Dalam pelaksanaannya berlaku efektif setelah dokumen izin Lingkungan (*Addendum* AMDAL) telah terbit.
4. Telah terbit Addendum izin Lingkungan AMDAL Nomor SK.1386/ MENLHK/ SETJEN/ PLA.4/ 12/ 2023 tanggal 22 Desember 2023 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
5. Telah terbit Persetujuan Kerja Keruk (PK3) atas penyesuaian lingkup Tahap I dan II dengan Nomor A.573/ AL.324/ DJPL tanggal 21 Mei 202 oleh Kementerian Perhubungan yang berlaku sampai dengan 21 Juni 2026.
6. Terdapat keterlambatan pekerjaan pengerukan pada Paket A oleh PT Wijaya Karya (Persero), bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: PD.05.01 /18/12/3/ KSTR/BMTH/ PLND-24 tanggal 18 Desember 2024 terkait penyelesaian Pekerjaan *Design and Build* Pengerukan Alur dan Kolam Pelabuhan Benoa Paket A, bahwa rencana penyelesaian pekerjaan diestimasikan selesai pada 20 Maret 2025 dengan pengerahan 3 *fleet(3 Grab Dredger)* peralatan keruk pada area kolam curah cair, gas, dan petikemas.

HAL-HAL LAIN YANG PERLU DIPERHATIKAN

Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Keuangan Melakukan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu atas Pemberian Dukungan Pemerintah kepada BUMN yaitu Pelindo dalam rangka pengendalian fiskal, yang dilakukan dari tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022. Dalam pengawasan yang dilakukan, terdapat beberapa hasil pengawasan berikut rekomendasi dari Itjen Kemenkeu. Merujuk pada Surat Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Keuangan nomor S- 22/ IJ.5/2023 tanggal 7 Desember 2023 perihal Penyampaian Hasil *Monitoring* Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu atas Pemberian Tambahan PMN Tahun 2021.

Bahwa dari 13 (tiga belas) rekomendasi terdapat 10 (sepuluh) rekomendasi yang disepakati untuk dinyatakan selesai atau tuntas dengan nilai presentase 76,9%. Masih terdapat 2 (dua) temuan dengan 3 (tiga) rekomendasi yang belum dapat dinyatakan selesai yaitu:

1. Rekomendasi nomor C.2.1, yakni menghitung kebutuhan dana PMN untuk penyelesaian pekerjaan pengerukan alur dan kolam dermaga dan segera menyetorkan kembali kelebihan dana sebesar Rp235.561.482.750 (dua ratus tiga puluh lima miliar lima ratus enam puluh satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan DJKN dan Kementerian BUMN.

3. The Ministry of Transportation issued a Phase II Dredging Work Approval (PK3) for the dredging of the remaining work volume. This implementation will be effective upon issuance of the Environmental Permit (AMDAL Addendum).
4. The Addendum to the AMDAL Environmental Permit Number SK.1386/ MENLHK/ SETJEN/ PLA.4/ 12/ 2023 dated December 22, 2023 was issued by the Ministry of Environment and Forestry.
5. The Ministry of Transportation issued a Dredging Work Approval (PK3) for the adjustment of the scope of Phases I and II, Number A.573/AL.324/DJPL, dated May 21, 202, valid until June 21, 2026.

6. There has been a delay in dredging work on Package A by PT Wijaya Karya (Persero). Based on Minutes Number: PD.05.01/18/12/3/KSTR/BMTH/PLND-24 dated December 18, 2024, regarding the completion of the Design and Build Work for Dredging the Benoa Port Channel and Basin Package A, the work is estimated to be completed on March 20, 2025, with the deployment of three fleets (three Grab Dredgers) of dredging equipment in the liquid, gas, and container bulk basin areas.

OTHER MATTERS TO NOTE

The Inspectorate General (Ltjen) of the Ministry of Finance conducted Specific Purpose Supervision of Government Support to State-Owned Enterprises (SOEs), namely Pelindo, for fiscal control purposes, from May 13, 2022, to August 31, 2022. The supervision resulted in several findings and recommendations from the Ltjen. Referring to the Letter of the Inspectorate General (Ltjen) of the Ministry of Finance Number S-22/IJ.5/2023 dated December 7, 2023, concerning Submission of Monitoring Results and Follow-up Actions for Specific Purpose Supervision of Additional State Capital Allocation in 2021.

Of the thirteen recommendations, 10 were agreed as completed, with a percentage of 76.9%. Two findings, with three recommendations remain incomplete:

1. Recommendation C.2.1, which requires calculating the State Capital Investment (PMN) funding requirements for completing the dredging of the dock channel and basin and immediately reimbursing the excess funds amounting to Rp235,561,482,750 (two hundred thirty-five billion five hundred sixty-one million four hundred eighty-two thousand seven hundred fifty rupiah) after prior consultation with the Directorate General of State-Owned Enterprises (DJKN) and the Ministry of State-Owned Enterprises.

2. Rekomendasi nomor C.2.2, yakni setelah proyek pekerjaan pengerukan selesai 100%, maka atas kelebihan dana PMN yang *idle* sebesar Rp65.608.500.000 (enam puluh lima miliar enam ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) agar disetorkan kembali ke kas negara dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan DJKN dan Kementerian BUMN.

3. Rekomendasi nomor D.1, yakni tidak menggunakan pendapatan bunga dari penempatan dana PMN untuk kajian yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian PMN. Dalam hal setelah proyek selesai masih tersisa dana dari pendapatan bunga PMN, agar disetorkan ke Kas Negara dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan DJKN dan Kementerian BUMN. Sebagai langkah tindak lanjut rekomendasi di atas telah dilakukan konsultasi antara Pelindo dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) serta Kementerian BUMN dengan hasil sebagai berikut:

2. Recommendation C.2.2 stated that after the dredging project is 100% completed, the remaining idle PMN funds of Rp65,608,500,000 (sixty-five billion six hundred eight million five hundred thousand rupiah) should be returned to the state treasury after prior consultation with the Directorate General of State-Owned Enterprises (DJKN) and the Ministry of State-Owned Enterprises.
3. Recommendation D.1 stated that interest income from PMN funds should not be used for studies inconsistent with the purpose of the PMN allocation. If, after the project is completed, there will be remaining funds from PMN interest income, they should be deposited into the State Treasury after prior consultation with the DJKN and the Ministry of State-Owned Enterprises. As a follow-up to the above recommendations, consultations have been held between Pelindo, the Directorate General of State Assets (DJKN), and the Ministry of State-Owned Enterprises, with the following results:

Nomor Rekomendasi Recommendation Number	**Tindak Lanjut** Follow-up	**Status**
C.2.1	1. Pelindo telah Menyampaikan kajian Penjelasan Tambahan informasi atas Penyesuaian Pemanfaatan Penyertaan Modal Negara (PMN) pada Pelindo Tahun Anggaran 2021. 2. Mengusulkan perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Penyertaan Modal Negara (PMN) dari semula Akumulasi Progress Proyek Pengerukan menjadi Akumulasi *Progress* Proyek Pengerukan dan Dinding Penahan Tanah (Revetment Wall) 3. Perubahan IKU telah mendapat persetujuan Menteri Keuangan melalui surat Nomor: S568/ ML.6/ 2024 tanggal tanggal 26 Juli 2024 perihal Persetujuan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Penyertaan Modal Negara (PMN) Pelindo Tahun 2021. 1. Pelindo submitted a study of additional information regarding the Adjustment to the Utilization of State Capital Participation (PMN) for the 2021 Fiscal Year. 2. Proposed a change in the Key Performance Indicator (KPI) for State Capital Participation (PMN) from Accumulated Progress of Dredging Projects to Accumulated Progress of Dredging and Revetment Wall Projects. 3. he change in the KPI received approval from the Minister of Finance through Letter Number: S568/ML.6/2024 dated July 26, 2024, concerning Approval of Changes to the Key Performance Indicator (KPI) for Pelindo's 2021 State Capital Participation (PMN).	Tuntas Completed
C.2.2 D.1	Pelindo telah Menyampaikan Pernyataan Komitmen melalui surat Nomor: PD.05.01/6/8/2/ PKPA/UTMA/PLND-24 tanggal 6 Agustus 2024 perihal Tindak Lanjut atas Rekomendasi Laporan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu pada Pemberian Tambahan PMN Tahun 2021, yang menyatakan bahwa pemanfaatan sisa anggaran PMN dan pemanfaatan bunga hasil penempatan anggaran PMN akan dilakukan setelah pekerjaan fisik pengerukan selesai 100% dan pemanfaatannya akan mengikuti ketentuan dari Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023. Pelindo submitted a Statement of Commitment through letter Number: PD.05.01/6/8/2/ PKPA/UTMA/PLND-24 dated August 6, 2024, concerning Follow-up to the Recommendations of the Supervisory Report with Specific Purposes regarding the Provision of Additional PMN in 2021. This statement stated that the remaining PMN budget and the interest from the PMN allocation will be used after the dredging work is 100% completed, and its utilization will comply with the provisions of the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-2/MBU/03/2023.	Tuntas Completed

ASPEK PEMASARAN

Uraian aspek pemasaran meliputi strategi pemasaran serta pangsa pasar atas produk dan jasa Pelindo.

STRATEGI PEMASARAN

Strategi pemasaran yang tepat akan mendorong peningkatan pangsa produk dan jasa Pelindo. Berikut adalah uraian mengenai strategi pemasaran Pelindo yang dilakukan masing-masing regional Pelindo di tahun 2025.

REGIONAL 1

Strategi pemasaran yang dilakukan oleh Regional 1 berfokus pada peningkatan kualitas layanan kepada pelanggan dan memperluas pangsa pasar yang meliputi beberapa aspek terkait yaitu:

Aspek Produk dan Layanan

Dalam memberikan layanan jasa kepelabuhanan, Regional 1 telah memberikan layanan jasa sesuai dengan target kinerja operasional dan diharapkan dapat juga memenuhi harapan pelanggan. Layanan jasa yang diberikan berfokus pada sisi waktu yaitu kecepatan layanan dan kualitas layanan.

1. Terhadap pengelolaan terminal penumpang, telah diterapkan pola pembayaran *cashless* yaitu di Cabang Belawan, Dumai, Tembilahan, Tanjung Balai Asahan dan Cabang Tanjungpinang.
2. Standarisasi dan Digitalisasi Cabang Pekanbaru dan Cabang Tembilahan.
3. Sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada Cabang Tanjung Balai Asahan, Cabang Tembilahan, Cabang Dumai dan Cabang Gunung Sitoli.

Aspek Pemanfaatan Lahan

Sebagai bagian dari upaya pemanfaatan lahan yang optimal, beberapa langkah strategis tengah dilaksanakan

1. Penyerahan Lahan dalam mekanisme Serah Operasi dengan *Subholding* SPSL di Cabang Belawan dan Perawang.
2. Selain itu, Regional 1 sedang dalam proses evaluasi terkait kerjasama dengan Mitra baru terkait Kerjasama Lahan.
3. Melakukan evaluasi terkait perpanjangan kontrak yang akan habis jangka waktu perjanjian.

Aspek Tarif

Regional 1 menerapkan kebijakan yang dapat diberikan kepada pelanggan khususnya pada segmen pelayanan jasa kapal sesuai kondisi di lapangan antara lain:

1. Memberikan kelonggaran jangka waktu pembayaran (*Term of Payment*/TOP) untuk perusahaan pengguna jasa, misalnya pemberian TOP 20 hari kepada PT Meratus Lines dan TOP 45 hari kepada Pengguna

MARKETING ASPECTS

The description of marketing aspects includes marketing strategies and market share for Pelindo's products and services.

MARKETING STRATEGY

An appropriate marketing strategy will drive an increase in the market share of Pelindo's products and services. The following shows Pelindo's marketing strategies implemented by each Pelindo region in 2025.

REGIONAL 1

Regional 1's marketing strategy focuses on improving the quality of service to customers and expanding market share, encompassing several related aspects, namely:

Product and Service Aspects

For providing port services, Region 1 delivered services in accordance with operational performance targets and is expected to meet customer expectations. The services provided focus on timeliness, namely speed of service and quality.

1. Cashless payment methods have been implemented for passenger terminal management at the Belawan, Dumai, Tembilahan, Tanjung Balai Asahan, and Tanjungpinang branches.
2. Standardization and digitalization of the Pekanbaru and Tembilahan branches.
3. Occupational Safety and Health Management System (SMK3) certification at the Tanjung Balai Asahan, Tembilahan, Dumai, and Gunung Sitoli branches.

Land Utilization Aspect

As part of efforts to optimize land utilization, several strategic steps are being implemented.

1. Land handover under the Operational Handover mechanism with the SPSL Subholding at the Belawan and Perawang Branches.
2. In addition, Regional 1 is in the process of evaluating collaboration with new partners regarding Land Cooperation.
3. Evaluating contract extensions that are about to expire.

Tariff Aspect

Regional 1 implements policies that can be provided to customers, particularly in the ship services segment, according to field conditions, including:

1. Providing flexible payment terms (TOP) for service users, for example, providing a 20-day TOP to PT Meratus Lines and a 45-day TOP to service users, particularly those operating in TUKS/Tersus and at port

Jasa khususnya yang berkegiatan di TUKS/Tersus dan di cabang Pelabuhan yang memiliki BUP Pesaing.
2. Memberikan Diskon 50% Tarif Jasa Kapal untuk kapal pesiar Star Voyager di Pelabuhan Kuala Tanjung (29 Mei - 10 Juni 2025).
3. Mitra Kerjasama pemanfaatan tarif properti diberikan opsi untuk memanfaatkan aset dengan beberapa pola kerjasama diluar tarif tetap dan tarif variabel yaitu dengan metode pengenaan minimum *throughput*.
4. Sistem pembayaran Kerjasama pemanfaatan aset properti jangka panjang dapat diberikan kelonggaran yaitu dengan sistem termin (angsuran).

Aspek Hubungan Pelanggan dan Stakeholder

Salah satu faktor penting dalam strategi pemasaran adalah menjaga hubungan baik dan harmonis dengan para *stakeholder*. Regional 1 telah melakukan beberapa kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan engagement dengan pelanggan dan *stakeholder*. Adapun kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. ***Forum Group Discussion*** **(FGD)**
   a. Insan Maritim Sumatera Utara pada tanggal 26 Februari 2025.
   b. *North Sumatera Invesment*, *Industry and Food Trade Halal Expo* 2025 pada tanggal 18 September 2025.
2. **Temu Mitra/Pelanggan**
   a. Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) SKK Migas Natuna yaitu Medco E&P Natuna Ltd, Star Energy (Kakap) Ltd, dan Premier Oil Antuna Sea B.V pada tanggal 13 Februari 2025.
   b. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan pada tanggal 06 Maret 2025.
   c. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sungai Guntung beserta Tim pada tanggal 14 Oktober 2025.
3. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Belawan, Direktur Utama PT Indonesia Kendaraan Terminal, Ketua DPW ALFI/ ILFA Sumatera Utara dan Ketua DPC INSA Medan Belawan pada tanggal 18 November 2025.
4. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Belawan dan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan pada tanggal 06 November 2025.
5. Audiensi dengan Kamar Dagang dan Industri Sumatera Utara pada tanggal 06 Maret 2025.
6. *Coffee Morning Stakeholder* Pelabuhan Tanjung Balai Asahan pada tanggal 23 April 2025.
7. *Customer visit* PT Musim Mas Belawan pada tanggal 20 Mei 2025.
8. Kegiatan Benchmark Pelayanan Operasional dan Penetapan Tarif Car Terminal Antara DPC ALFI/ILFA SUMUT, DPC INSA Medan Belawan, KSOP Utama Belawan dan Pelindo Group di PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk, Jakarta pada tanggal 15 Juli 2025.,

branches with competing BUPs.

2. Providing a 50% discount on ship service rates for the Star Voyager cruise ship at Kuala Tanjung Port (May 29 - June 10, 2025).
3. Property tariff utilization cooperation partners are given the option to use assets through cooperation schemes beyond fixed and variable tariffs, including the minimum throughput method.
4. Payment systems for long-term property asset utilization cooperation can be relaxed, including installment payments.

Customer and Stakeholder Relations Aspect

One important factor in the marketing strategy is maintaining good and harmonious relationships with stakeholders. Region 1 has conducted several activities aimed at increasing engagement with customers and stakeholders. These activities include:

1. **Forum Group Discussion (FGD)**
   a. Maritime Workers of North Sumatra on February 26, 2025.
   b. North Sumatra Investment, Industry, and Food Trade Halal Expo 2025 on September 18, 2025.
2. **Partner/Customer Meeting**
   a. SKK Migas Natuna Cooperation Contract Contractors (KKKS), namely Medco E&P Natuna Ltd, Star Energy (Kakap) Ltd, and Premier Oil Antuna Sea B.V., on February 13, 2025.
   b. Medan City Regional Tax and Retribution Management Agency (BPPRD) on March 6, 2025.
   c. Head of the Sungai Guntung Class III Port Management Unit Office and Team on October 14, 2025.
3. Head of the Belawan Main Port Authority and Harbormaster Office, President Director of PT Indonesia Kendaraan Terminal, Chairperson of the ALFI/ILFA North Sumatra Regional Leadership Council, and Chairperson of the INSA Medan Belawan Branch on November 18, 2025.
4. Head of the Harbormaster and Main Port Authority Office of Belawan and the Class I Medan Railway Engineering Center on November 6, 2025.
5. Audience with the North Sumatra Chamber of Commerce and Industry on March 6, 2025.
6. Coffee Morning Meeting with Tanjung Balai Asahan Port Stakeholders on April 23, 2025.
7. Customer Visit by PT Musim Mas Belawan on May 20, 2025.
8. Benchmarking of Operational Services and Car Terminal Tariff Determination between the ALFI/ILFA North Sumatra Branch, the INSA Medan Belawan Branch, the Belawan Main Operational Management Office (KSOP), and the Pelindo Group at PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk, Jakarta on July 15, 2025.

REGIONAL 2

Selaras dengan strategi management kantor pusat yang dituangkan dalam pilar strategis dan *key anable* dengan kondisi dengan lingkungan Regional 2 dalam mendukung strategi *Integrated Conectivity* sesuai dengan *roadmap* Pelindo, Regional 2 terus mengembangkan strategi pemasaran melalui upaya-upaya pada peningkatan kualitas layanan kepada pelanggan dan memperluas pangsa pasar yang meliputi beberapa aspek terkait yaitu yang terdiri dari beberapa aspek yang telah dilakukan pada Tahun 2025 antara lain:

1. **Pelayanan Pelanggan**
   Dalam memenuhi kepuasan Pelanggan, menjaga retensi pelanggan dan menarik minat pelanggan baru terhadap layanan yang diberikan oleh Regional 2, telah dilakukan beberapa kegiatan Pelayanan Pelanggan yaitu:
   a. ***Go Live Customer Care* Pelindo**
      Telah dilakukan *Go Live Customer Care* Pelindo dengan Telepon 102, Whatsapp 08111552102 dan *e-mail* customer.care@pelindo.co.id pada tanggal 21 Mei 2025 sebagai media layanan penerima Suara Pelanggan yang terintegrasi, responsif dan berorientasi solusi atas layanan Jasa Kepelabuhanan dan Jasa Terkait Kepelabuhanan di Lingkungan Pelindo, *Subholding* dan Entitas Anak.
   b. **Pelaksanaan Survei Kepuasan Pelanggan**

      Survei Kepuasan Pelanggan di Lingkungan Regional 2 telah dilaksanakan dengan hasil indeks Kepuasan Pelanggan 4,62 dengan kategori sangat puas.
   c. **Pelaksanaan Kegiatan Bina Pelanggan**

      Regional 2 telah melakukan beberapa kegiatan bina pelanggan berupa *customer visit* kepada pelanggan eksisting maupun calon pelanggan potensial serta kegiatan lain untuk meningkatkan *engagement* ke pelanggan. Selain dilakukan *customer visit*, dilakukan kegiatan lainnya seperti *coffee morning/ sharing session* pelanggan, sosialisasi kepada pelanggan, dan *customer countersy*.
2. **Penyesuaian Tarif**
   Telah dilakukan penyesuaian tarif sebanyak 12 (dua belas) tarif di 6 (enam) cabang yaitu cabang Panjang, Palembang, Tanjung Pandan, Tanjung Priok, Pontianak, Pangkal Balam sebagai berikut:
   a. Panjang: Tarif Oil Spil Response dan Tarif Port Facility Service.
   b. Palembang: Tarif Pelayanan Jasa Alat Mekanik/ Crane Dermaga, Tarif Port Faclity Service (PFS), Tarif Pas Penumpang.
   c. Tanjung Pandan: Tarif Tanda Masuk (Pas) Pelabuhan untuk TKBM (Tanjung Pandan).
   d. Tanjung Priok: Tarif Pas Kendaraan, Tarif hiCo Scan, Tarif Pas Penumpang (Tanjung Priok).
   e. Pontianak: Tarif kepil Dwikora Pontianak dan Kijing (Pontianak).

REGIONAL 2

In line with the head office management strategy outlined in the strategic pillars and key indicators, in line with the environmental conditions of Region 2, for supporting the Integrated Connectivity strategy in accordance with Pelindo's roadmap, Region 2 continues to develop its marketing strategy through efforts to improve the quality of customer service and expand market share. This includes several related aspects, including:

1. **Customer Service**
   To achieve customer satisfaction, maintain customer retention, and attract new customers to the services provided by Region 2, several Customer Service activities have been carried out, including:
   a. **Pelindo Go Live Customer Care**
      Pelindo Go Live Customer Care was launched on May 21, 2025, via telephone at 102, WhatsApp at 08111552102, and email at customer.care@pelindo.co.id. This service provides an integrated, responsive, and solution-oriented customer voice service for port and port-related services within Pelindo, its subholdings, and subsidiaries.
   b. **Implementation of a Customer Satisfaction Survey**
      A Customer Satisfaction Survey in Region 2 was conducted, resulting in a Customer Satisfaction Index of 4.62, categorized as very satisfied.
   c. **Implementation of Customer Development Activities**
      Regional 2 has conducted several customer development activities, including customer visits to existing and potential customers, as well as other activities to increase customer engagement. In addition to customer visits, other activities included coffee mornings/customer sharing sessions, customer outreach, and customer counterservice.
2. **Tariff Adjustments**
   12 (Twelve) tariff adjustments have been made at 6(six) branches: Panjang, Palembang, Tanjung Pandan, Tanjung Priok, Pontianak, and Pangkal Balam, as follows:
   a. Panjang: Oil Spill Response Tariff and Port Facility Service Tariff.
   b. Palembang: Dock Mechanic/Crane Service Tariff, Port Faclity Service (PFS) Tariff, Passenger Pass Tariff.
   c. Tanjung Pandan: Port Entry (Pas) Tariff for TKBM (Tanjung Pandan).
   d. Tanjung Priok: Vehicle Pass Tariff, HiCo Scan Tariff, Passenger Pass Tariff (Tanjung Priok).
   e. Pontianak: Dwikora Pontianak and Kijing Port Tariff (Pontianak).

f. Pangkal Balam: Tarif Pelayanan Jasa Penggunaan Alat dan Tarif Pelayanan Jasa Rupa Rupa Usaha Lainnya, Tarif Jasa Terminal Penumpang dan tanda Masuk Pas Pelabuhan.

3. **Aspek Pengembangan Usaha**
   Untuk meningkatkan *Level of Service* Layanan Jasa Pelabuhan, sekaligus meningkatkan sumber pendapatan perusahaan, beberapa pengembangan usaha yang dilakukan di Regional 2 antara lain:
   a. Pengoperasian terminal Bojonegara.
   b. Pengembangan terminal curah cair Bengkulu yg ditargetkan beroperasi pada 2026.
   c. Persiapan jasa pengelolaan alur Bengkulu yg ditargetkan mulai beroperasi pada 2026.
   d. Pengoperasian fasilitas curah cair baru di pangkal balam.
   e. Pengembangan fasilitas penanganan petikemas di beberapa lokasi di Pelabuhan Tanjung Priok yang ditargetkan beroperasi pada 2027.
4. **Optimalisasi Aset dan Lahan**
   a. Telah dilakukan Kerjasama Pemanfaatan Lahan *idle* pada tahun 2025 dengan luas sebesar 207.839,88 M2
   b. Relokasi alat bongkar muat.

Terdapat 10 relokasi alat bongkar muat di Lingkungan Regional 2 yaitu sebagai berikut:

f. Pangkal Balam: Service Fees for Equipment Usage and Other Miscellaneous Business Services, Passenger Terminal Service Fees, and Port Entry Passes.

3. **Business Development Aspect**
   To improve the Port Services Level of Service and to increase the Company's revenue sources, several business developments were undertaken in Region 2 including:
   a. Operation of the Bojonegara terminal.
   b. Development of the Bengkulu liquid bulk terminal, targeted for operation in 2026.
   c. Preparation of the Bengkulu channel management service, targeted for operation in 2026.
   d. Operation of the new liquid bulk facility in Pangkal Balam.
   e. Development of container handling facilities at several locations at Tanjung Priok Port, targeted for operation in 2027.
4. **Asset and Land Optimization**
   a. Collaboration on the Utilization of Idle Land, totaling 207,839.88 M2, was implemented in 2025.
   b. Relocation of Loading and Unloading Equipment.

There are 10 relocations of loading and unloading equipment in Regional Area 2, as follows:

Tabel Relokasi Alat Bongkar Muat
Relocation of Loading and Unloading

Nama Alat Equipment	Jumlah Amount	Tujuan Purpose	Dari From
QCC	1	TPK Kijing	TPK Koja
	1	TPK Kijing	TPK Belawan
RTG	2	Makassar New Port	MTI Tanjung Priok
	2	Terminal Teluk Lamong	MTI Tanjung Priok
	4	TPK Kijing	TPK Makassar T1

REGIONAL 3

Strategi Pemasaran Pelindo Regional 3 pada tahun 2026 mengarah pada penguatan posisi sebagai operator pelabuhan yang terintegrasi yang tidak hanya berfokus pada peningkatan arus dan pendapatan, tetapi juga pada penciptaan nilai tambah melalui peningkatan layanan, transformasi digital, penguatan konektivitas logistik, serta kebijakan tarif yang adaptif dan kompetitif.

1. **Aspek Layanan**
   Pelindo Regional 3 terus berupaya meningkatkan kualitas layanan Pelabuhan untuk memperkuat daya saing dan efisiensi operasional. Adapun program peningkatan layanan yang akan dilakukan untuk tahun 2026 adalah sebagai berikut:
   a. Standarisasi dan Digitalisasi Layanan, melalui:
      - Penguatan implementasi K3.
      - Implementasi *integrated planning* dan *control*.

REGIONAL 3

Pelindo Regional 3's marketing strategy for 2026 aims to strengthen its position as an integrated port operator, focusing not only on increasing traffic and revenue, but also on creating added value through service enhancements, digital transformation, strengthening logistics connectivity, and adopting adaptive and competitive tariff policies.

1. **Service Aspect**
   Pelindo Regional 3 continues to improve the quality of port services to strengthen its competitiveness and operational efficiency. The service improvement programs to be implemented in 2026 are as follows:
   a. Service Standardization and Digitalization, through:
      - Strengthening the implementation of OHS.
      - Implementing integrated planning and control.

- Standarisasi Fasilitas Pendukung Terminal Penumpang dan Kendaraan Ro-Ro.
- Integrasi sistem layanan petikemas dengan sistem pelayanan kapal.
- Integrasi data antara aplikasi PTOS-R dan Aplikasi Phinnisi.

b. Pelaksanaan Program Stranas PK terkait aksi logistik nasional di Pelabuhan Batulicin, Labuhan Bajo dan Maumere.
- Standarisasi Layanan *Customer Care* Pelindo 102 untuk kemudahan pengelolaan suara Pelanggan
- Peningkatan Fasilitas dan Peralatan Pelabuhan, melalui:
- Revitalisasi fasilitas pokok dan penunjang Pelabuhan.
- Optimalisasi aksesibilitas darat Pelabuhan.
- Program penanganan banjir di Tanjung Emas Semarang.
- Elektrifikasi peralatan bongkar muat dan peningkatan kualitas alat penunjang bongkar muat.

2. **Aspek Pricing**
Pentarifan yang akan dijalankan di Pelindo Regional 3 berbasis pada *value-based pricing* dan *competitive pricing,* dimana tarif diterapkan sesuai dengan kualitas layanan yang diberikan serta tetap adaptif terhadap kondisi market sehingga tetap dapat kompetitif dalam industri logistik dan kepelabuhanan. Sebagai bagian dari strategi pentarifan, Pelindo Regional 3 juga akan memberikan kebijakan diskon/insentif secara selektif kepada Pengguna Jasa untuk dapat mendorong pertumbuhan bisnis, menjaga daya saing serta meningkatkan loyalitas Pengguna Jasa.

3. **Aspek Penguatan Konektivitas Logistik**
Untuk menjaga pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, Pelindo Regional 3 akan memperkuat integrasi dan konektivitas logistik melalui:
a. Pengembangan Terminal Batang yang terintegrasi dengan Kawasan industri.
b. Peningkatan layanan di pelabuhan Manyar untuk mendukung Kawasan Industri JIIPE.
c. Pelaksanaan Joint marketing dengan *Sub-Holding*.
d. Pengembangan ekosistem cruise dan maritime tourism di Benoa *Maritim Tourism Hub* - Pelabuhan Benoa berkolaborasi dengan mitra strategis.
e. Optimalisasi Aset.
f. Penataan Pelabuhan di Tanjung Perak, Tanjung Emas, dan Banjarmasin.

REGIONAL 4

Strategi pemasaran yang dilakukan oleh Regional 4 meliputi beberapa aspek terkait yaitu:

1. **Aspek Peningkatan Layanan**
Pelindo Regional 4 berkomitmen untuk memberikan kualitas pelayanan prima kepada pelanggan melalui

- tandardizing Supporting Facilities for Passenger Terminals and Ro-Ro Vehicles.
- Integrating the container service system with the ship service system.
- Data integration between the PTOS-R application and the Phinnisi application.

b. Implementing the Stranas PK Program related to national logistics actions at the ports of Batulicin, Labuhan Bajo, and Maumere.
- Standardizing Pelindo 102 Customer Care Services to facilitate customer voice management.
- Improving Port Facilities and Equipment, through:
- Revitalizing the port's main and supporting facilities.
- Optimizing port land accessibility.
- Flood management program in Tanjung Emas, Semarang.
- Electrifying loading and unloading equipment and improving the quality of loading and unloading support equipment.

2. **Pricing Aspect**
The pricing at Pelindo Regional 3 will be based on value-based and competitive pricing. Tariffs are applied according to the quality of service provided and remain adaptive to market conditions, ensuring competitiveness in the logistics and port industry. As part of this pricing strategy, Pelindo Regional 3 will also offer selective discounts/incentives to service users to encourage business growth, maintain competitiveness, and enhance user loyalty.

3. **Strengthening Logistics Connectivity Aspect**
To maintain sustainable business growth, Pelindo Regional 3 will strengthen logistics integration and connectivity through:
a. Developing the Batang Terminal integrated with the Industrial Estate.
b. Improving services at Manyar Port to support the JIIPE Industrial Estate.
c. Implementing joint marketing with sub-holdings.
d. Developing a cruise and maritime tourism ecosystem at the Benoa Maritime Tourism Hub - Benoa Port in collaboration with strategic partners.
e. Optimizing assets.
f. Port Restructuring in Tanjung Perak, Tanjung Emas, and Banjarmasin.

REGIONAL 4

Regional 4's marketing strategy covers several related aspects, including:

1. **Service Improvement Aspect**
Pelindo Regional 4 is committed to providing excellent service quality to customers through continuous

perbaikan dan pengembangan layanan secara berkelanjutan. Adapun rencana aksi untuk peningkatan layanan yang akan dilakukan antara lain:

a. Standarisasi Fasilitas Pendukung Terminal Penumpang.
b. Tindak Lanjut Pasca Standarisasi dan Digitalisasi Petikemas.
c. Tindak Lanjut Pasca Standarisasi dan Digitalisasi Non Petikemas.
d. Implementasi *Integrated Planning and Control*.
e. Integrasi data Antara Aplikasi PTOS-R dengan Aplikasi Phinnisi.
f. Integrasi data penumpang dan kendaraan roro antar terminal.
g. Implementasi Program Investasi Pengembangan/ Perbaikan Dermaga dan Kolam Pelabuhan.
h. Implementasi Program Investasi Pengembangan/ Perbaikan Bangunan dan Terminal Penumpang.
i. Implementasi Program Investasi Pengembangan/ Perbaikan Jalan Akses dan Lapangan Penumpukan.
j. Implementasi Program Investasi Bidang Peralatan.

2. **Aspek Hubungan Pelanggan dan Stakeholder (*Customer Relationship and Managing Stakeholders*)**
Dalam industri kepelabuhanan, Regional 4 memandang keberhasilan bisnis tidak hanya ditentukan oleh infrastruktur dan kinerja operasional, tetapi juga oleh kualitas hubungan dengan pelanggan dan para pemangku kepentingan. Untuk itu, Regional 4 berkomitmen untuk menjalankan program yang dapat mendengarkan kebutuhan dan keinginan pelanggan sehingga dapat memberikan layanan yang unggul, berkelanjutan, dan berdaya saing global. Adapun beberapa program dimaksud diantaranya dengan monitoring dan tindak lanjut keluhan pelanggan, pengembangan strategi komunikasi korporasi untuk hubungan kelembagaan dan investor, *coffee morning, customer visit* dan kegiatan terkait lainnya.
3. **Aspek Pentarifan (*Pricing*)**
Untuk menjaga eksistensi dan daya saing, Pelindo Regional 4 berupaya menghadirkan layanan jasa di pelabuhan dengan strategi pentarifan sesuai ketentuan yang berlaku, diantaranya:
   a. Penyesuaian tarif jasa kepelabuhanan dan terkait kepelabuhanan untuk menjaga performa layanan dan performa keuangan Perseroan.
   b. Pemberian insentif, diskon, kebijakan jangka waktu pembayaran, serta *reward* lainnya sesuai dengan ketentuan dalam rangka menjaga loyalitas pelanggan.
   c. Kemudahan proses pembayaran diantaranya melalui sistem *autocollection* dan sistem *cashless*.

service improvement and development. The action plan for service improvement includes:

a. Standardizing Passenger Terminal Support Facilities.
b. Following-up after Standardization and Digitalization of Containers.
c. Following-up after Standardization and Digitalization of Non-Container Items.
d. Implementing Integrated Planning and Control.
e. Integrating data between the PTOS-R application and the Phinnisi application.
f. Integrating passenger and roll-on-roll (RORO) vehicle data between terminals.
g. Implementing the Investment Program for the Developing/Improving Piers and Port Basins.
h. Implementing the Investment Program for the Development/Improvement of Buildings and Passenger Terminals.
i. Implementing the Investment Program for the Development/Improvement of Access Roads and Stacking Yards.
j. Implementing the Investment Program in the Equipment Sector.

2. **Customer Relationship and Managing Stakeholders**

In the port industry, Region 4 believes that business success is determined not only by infrastructure and operational performance, but also by the quality of relationships with customers and stakeholders. Therefore, Region 4 is committed to implementing programs that listen to customer needs and desires, thereby providing superior, sustainable, and globally competitive services. These programs include monitoring and following up on customer complaints, developing corporate communication strategies for institutional and investor relations, coffee mornings, customer visits, and other related activities.

3. **Pricing Aspect**
To maintain its existence and competitiveness, Pelindo Regional 4 provides port services with a pricing strategy in accordance with applicable regulations, including:
   a. Adjusting port and port-related service tariffs to maintain the Company's service performance and financial performance.
   b. Providing incentives, discounts, payment term policies, and other rewards in accordance with regulations to maintain customer loyalty.
   c. Simplifying the payment process, including through auto-collection and cashless systems.

PANGSA PASAR

Pelindo secara umum menghadapi persaingan yang ketat dengan berbagai perusahaan lain dalam merebutkan penguasaan pasar. Persaingan usaha ini dapat diamati melalui segmentasi pasar berdasarkan curah cair dan curah kering. Curah cair adalah muatan dalam bentuk cairan yang diangkut dalam kapal tanker atau tangki khusus. Barang ini langsung dimuat dan dibongkar menggunakan pipa atau pompa tanpa dikemas terlebih dahulu. Contoh muatan curah cair antara lain seperti minyak mentah *(crude oil),* Bahan bakar Minyak (BBM), bahan kimia cair *(chemical liquid*), dan lain sebagainya. Sedangkan curah kering adalah barang dalam bentuk padat/granular yang diangkut dalam jumlah besar tanpa kemasan, langsung dituang ke dalam palka kapal melalui conveyor maupun sejenisnya. Contoh muatan curah kering antara lain batubara, bijih besi, semen, gandum, dan lain sebagainya.

Pangsa pasar kargo curah cair dan curah kering di Indonesia, khususnya dalam segmen non petikemas, menunjukkan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Kedua jenis kargo ini memainkan peran penting dalam mendukung sektor industri, energi, dan pertanian.

Pada tahun 2025, pangsa pasar curah (curah cair dan curah kering) yang dikelola oleh Pelindo mencapai 65%. Perkembangan pangsa pasar yang signifikan ini menjadi bukti keberhasilan strategi Pelindo dalam memperkuat posisi di industri, baik di segmen curah cair maupun curah kering yang menciptakan peluang untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan daya saing di pasar yang semakin kompetitif.

MARKET SHARE

Pelindo generally faces intense competition with other companies for market share. This business competition can be seen through market segmentation based on liquid bulk and dry bulk. Liquid bulk is liquid cargo transported in tankers or special tanks. This cargo is directly loaded and unloaded using pipes or pumps without prior packaging. Examples of liquid bulk cargo include crude oil, fuel oil (BBM), liquid chemicals, etc. While, dry bulk is solid/granular goods transported in large quantities without packaging, directly poured into the ship's hold via conveyor or similar means. Examples of dry bulk cargo include coal, iron ore, cement, wheat, etc.

The market share for liquid bulk and dry bulk cargo in Indonesia, particularly in the non-containerized segment, demonstrates a significant contribution to the national economy. Both types of cargo play a crucial role in supporting the industrial, energy, and agricultural sectors.

By 2025, Pelindo's market share of bulk (liquid bulk and dry bulk) managed by the Indonesian Shipping Company (Pelindo) reached 65%. This significant market share growth demonstrates the success of Pelindo's strategy to strengthen its position in the industry, both in the liquid bulk and dry bulk segments, creating opportunities to expand its reach and increase competitiveness in an increasingly competitive market.

Pangsa pasar curah (curah cair dan curah kering) Tahun 2025
Pangsa pasar curah (curah cair dan curah kering) Tahun 2025

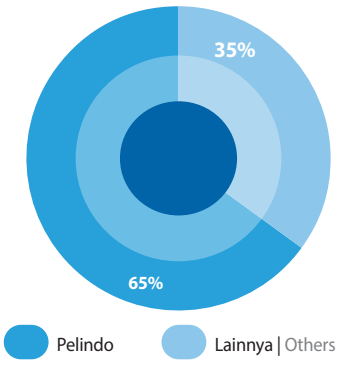

TINJAUAN OPERASI PER SEGMEN USAHA

Segmen adalah bagian yang dapat dibedakan dari Kelompok Usaha yang terlibat baik dalam menyediakan produk atau jasa tertentu (segmen usaha) yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan segmen lainnya. Segmen usaha Pelindo dikelompokan ke dalam segmen

OPERATIONAL REVIEW BY BUSINESS SEGMENT

A segment is a distinguishable part of a Business Group engaged in providing a specific product or service (business segment) that has risks and rewards that differ from those of other segments. Pelindo's business segments are grouped into Port Operations and Other Services. The

usaha Operasi Kepelabuhan dan Jasa Lainnya. Segmen Kepelabuhan meliputi arus kapal, arus petikemas, arus barang non petikemas dan arus penumpang. Segmen Jasa Lainnya meliputi Pengusahaan Tanah, Bangunan, Air dan Listrik (TBAL) dan Fasilitas Rupa-Rupa.

Port Segment includes ship traffic, container traffic, non-containerized goods traffic, and passenger traffic. The Other Services Segment includes Land, Building, Water, and Electricity (TBAL) and Miscellaneous Facilities.

PENJELASAN DAN PRODUKTIVITAS SEGMEN USAHA

BUSINESS SEGMENT EXPLANATION AND PRODUCTIVITY

OPERASI KEPELABUHAN

Operasi kepelabuhan meliputi arus kapal, arus petikemas, arus barang non petikemas dan arus penumpang.

PORT OPERATIONS

Port operations includes ship traffic, container traffic, non-containerized goods traffic, and passenger traffic.

ARUS KAPAL

Arus kapal merupakan jumlah kapal yang mendapatkan pelayanan jasa kapal dari perusahaan dan dibuktikan dengan dikeluarkannya nota jasa pelabuhan. Pencatatan trafik kapal ini dalam satuan unit kapal dan *gross tonnage* kapal serta dibedakan berdasarkan jenis lokasi pelayanan, jenis pelayaran dan jenis kapal.

SHIP TRAFFIC

is the number of ships receiving ship services from the Company, evidenced by the issuance of port service notes. This ship traffic recording is in units of ships and gross tonnage, and is differentiated by service location, voyage type, and ship type.

Tabel Arus Kapal
Ship Traffic

Uraian Description	Satuan Unit	2025	2024*)	Pertumbuhan Growth	
				(Nominal)	(%)
Dermaga Umum Public Wharves					
Internasional International	Unit	**24.964**	23.560	1.404	5,96%
	GT	**249.663.336**	234.237.429	15.425.907	6,59%
Domestik Domestic	Unit	**131.502**	129.303	2.199	1,70%
	GT	**396.250.132**	405.489.753	(9.239.621)	(2,28%)
Total Dermaga Umum Total Public Wharves	Unit	**156.466**	152.863	3.603	2,36%
	GT	**645.913.468**	639.727.182	6.186.286	0,97%
Non Dermaga Umum Non-Public Wharves					
Internasional International	Unit	**18.191**	15.163	3.028	19,97%
	GT	**218.803.785**	248.563.665	(29.759.880)	(11,97%)
Domestik Domestic	Unit	**195.156**	150.597	44.559	29,59%
	GT	**558.170.466**	514.630.853	43.539.613	8,46%
Total Non Dermaga Umum Total Non-Public Wharves	Unit	**213.347**	165.760	47.587	28,71%
	GT	**776.974.251**	763.194.518	13.779.733	1,81%
Total Arus Kapal Total Ship Traffic	Unit	**369.813**	318.623	51.190	16,07%
	GT	**1.422.887.719**	1.402.921.700	19.966.019	1,42%

*) Sesuai dengan Standardisasi Pencatatan Arus Kapal
*) Adjusted to the standardization of vessel traffic

Dengan diterapkannya standardisasi pencatatan arus tahun 2025, maka arus kapal tahun 2024 yang ditampilkan pada tabel di atas merupakan arus kapal dengan pola pencatatan terstandardisasi, yang semula 317.146 Unit dan 1.426.404.678 GT menjadi 318.623 Unit dan 1.402.921.700 GT.

Following the standardization of traffic recording in 2025, the ship traffic in the above table of 317,146 units and 1,426,404,678 GT used the standardized recording pattern, which then became 318, 624 units and 1,402,921,700 GT units.

Realisasi arus kapal dalam satuan Unit tahun 2025 mencapai 369.813 Unit, meningkat 16,07% dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 318.623 Unit. Demikian pula dengan realisasi arus kapal dalam satuan GT tahun 2025 sebesar 1.422.887.719 GT, meningkat 1,42% dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 1.402.921.700 GT. Peningkatan arus kapal tersebut dikarenakan meningkatnya kunjungan kapal bermuatan batubara pada lokasi Tersus dan ship to ship (STS) di Balikpapan dan Samarinda, serta adanya kerjasama di Pekanbaru untuk layanan pemanduan kapal di wilayah Jembatan Siak dan di Tersus Futong. Peningkatan arus juga sebagai dampak adanya peningkatan kunjungan kapal petikemas di Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Tanjung Emas akibat adanya *extra call* maupun penambahan rute dari perusahaan pelayaran.

The 2025 ship traffic figures, in units, reached 369,813 units, a 16.07% increase compared to 318,623 units in 2024. Similarly, the 2025 ship traffic figures, in GT, reached 1,422,887,719 GT, a 1.42% increase compared to 1,402,921,700 GT in 2024. The increase in ship traffic was due to increased calls by coal-laden vessels to the Tersus and ship-to-ship (STS) locations in Balikpapan and Samarinda, as well as cooperation in Pekanbaru for ship pilotage services in the Siak Bridge area and at Tersus Futong. The increase in traffic was also due to increased container ship calls at Tanjung Priok, Tanjung Perak, and Tanjung Emas due to extra calls and additional routes from shipping companies.

ARUS PETIKEMAS

Arus petikemas adalah jumlah petikemas yang dibongkar/muat di pelabuhan dalam satuan box dan TEUs. Petikemas ini dibedakan berdasarkan jenis kegiatan, jenis perdagangan, ukuran dan jenis kemasan petikemas.

CONTAINER TRAFFIC

Container traffic is the number of containers loaded/unloaded at the port, measured in boxes and TEUs. Containers are categorized based on activity type, trade type, size, and packaging type.

Tabel Arus Petikemas
Container Traffic

Uraian Description	Satuan Unit	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
				(Nominal)	(%)
Pelayanan Luar Negeri Overseas Services	Box	**5.924.880**	5.662.205	262.675	4,64%
	TEUs	**9.243.302**	8.700.826	542.476	6,23%
Pelayanan Dalam Negeri Domestic Services	Box	**8.950.903**	8.636.275	314.628	3,64%
	TEUs	**10.542.237**	10.106.263	435.974	4,31%
Total Arus Petikemas Total Container Traffic	Box	**14.875.783**	14.298.480	577.303	4,04%
	TEUs	**19.785.539**	18.807.089	978.450	5,20%

Realisasi arus petikemas dalam satuan Box tahun 2025 sebesar 14.875.783 Box, meningkat 4,04% dibandingkan tahun 2024 sebesar 14.298.480 Box. Demikian pula dengan arus petikemas dalam satuan TEUs yang meningkat sebesar 5,20%, dari 18.807.089 TEUs di tahun 2024 menjadi 19.785.539 TEUs di tahun 2025. Hal ini dipengaruhi oleh adanya *extra call* maupun penambahan rute kapal petikemas di Tanjung Priok, Tanjung Perak dan Tanjung Emas.

The actual containers traffic in box units in 2025 was 14,875,783 boxes, a 4.04% increase compared to 14,298,480 boxes in 2024. Similarly, the containers traffic in TEUs increased by 5.20%, from 18,807,089 TEUs in 2024 to 19,785,539 TEUs in 2025. This increase was due to additional calls and additional container ship routes at Tanjung Priok, Tanjung Perak, and Tanjung Emas.

ARUS BARANG NON PETIKEMAS

Arus barang non petikemas adalah jumlah barang yang dibongkar/muat di pelabuhan dalam satuan ton, meter kubik, MMBTU, unit dan ekor. Barang non petikemas dibedakan berdasarkan lokasi kegiatan, jenis kegiatan, jenis perdagangan dan jenis kemasan.

NON-CONTAINER TRAFFIC

Non-container traffic is the amount of goods loaded/unloaded at the port in tons, cubic meters, mmbtu (mmbtu), units, and units. Non-containerized goods are differentiated based on location, type of activity, type of trade, and type of packaging.

Tabel Arus Barang Non Petikemas
Non-Container Traffic

Uraian Description	**Satuan** Unit	**2025**	**2024**	**Pertumbuhan Growth**	
				(Nominal)	(%)
Dermaga Umum Public Wharves	Ton	**125.758.845**	125.714.712	44.133	0,04%
	M3	**6.385.948**	6.863.971	(478.023)	(6,96%)
	Unit	**3.066.552**	2.872.352	194.200	6,76%
	MMBTU	**15.943.575**	13.971.183	1.972.392	14,12%
	Ekor Heads	**787.682**	739.717	47.965	6,48%
Non Dermaga Umum Non-Public Wharves	Ton	**69.409.709**	75.467.383	(6.057.674)	(8,03%)
	M3	**75.292**	63.677	11.615	18,24%
	Unit	**2.604**	1.535	1.069	69,64%
	MMBTU	**-**	-	-	-
	Ekor Heads	**-**	-	-	-
Total	Ton	**195.168.554**	201.182.095	(6.013.541)	(2,99%)
	M3	**6.461.240**	6.927.648	(466.408)	(6,73%)
	Unit	**3.069.156**	2.873.887	195.269	6,79%
	MMBTU	**15.943.575**	13.971.183	1.972.392	14,12%
	Ekor Heads	**787.682**	739.717	47.965	6,48%

Realisasi arus barang non petikemas dalam satuan Ton tahun 2025 mencapai 195.168.554 Ton, menurun 2,99% dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 201.182.095 Ton. Hal ini dipengaruhi adanya akumulasi penerbitan nota di Cabang Samarinda pada tahun 2024 sebesar 9.982.168 ton. Apabila pencatatan trafik atas akumulasi penerbitan nota tersebut diabaikan, maka terdapat pertumbuhan trafik non petikemas sebesar 2% yang disebabkan telah beroperasinya jetty baru di TUKS Balikpapan, *steel product* dan CPO di Tanjung Priok, serta LPG dan pasir kuarsa di Tanjung Emas.

The actual non-containerized goods traffic in tons in 2025 reached 195,168,554 tons, a 2.99% decrease compared to 201,182,095 tons in 2024. This was due to the accumulated issuance of invoices at the Samarinda Branch in 2024, amounting to 9,982,168 tons. Ignoring the traffic recorded for the accumulated issuance of notes, non-containerized traffic increased by 2% due to the operation of the new jetty at TUKS Balikpapan, steel products and CPO at Tanjung Priok, and LPG and quartz sand at Tanjung Emas.

Realisasi arus barang non petikemas dalam satuan M3 tahun 2025 mencapai 6.461.240 M3, menurun 6,73% dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 6.927.648 M3. Hal ini dipengaruhi penurunan kegiatan ekspor *Windmill Tower* milik salah satu produsen menara angin di Banten. Selain itu, telah selesainya pembangunan smelter di Gresik dan pabrik di KIT Batang pada Tanjung Emas.

The realized non-containerized goods traffic in cubic meters (m3) in 2025 reached 6,461,240 m3, a 6.73% decrease compared to 6,927,648 m3 in 2024. This was due to a decrease in export activity for windmill towers owned by a wind tower manufacturer in Banten. Also, the construction of a smelter in Gresik and a factory at the Batang Port in Tanjung Emas has been completed.

Realisasi arus barang non petikemas dalam satuan Unit tahun 2025 mencapai 3.069.159 Unit, meningkat 6,79% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai 2.873.887 Unit. Hal ini dipengaruhi peningkatan yang dipengaruhi oleh bongkar muat mobil di IKT Tanjung Priok, Pontianak, dan Makassar akibat kenaikan bongkar muat dan ekspor impor kendaraan, termasuk kendaraan listrik (EV). Selain itu, layanan kapal *Roll-on/Roll-off* (RoRo) mengalami pertumbuhan yang signifikan di pelabuhan, antara lain Tanjung Perak, Lembar, Tanjung Wangi, dan Tenau Kupang.

The realized non-containerized goods traffic in units in 2025 reached 3,069,159 units, a 6.79% increase compared to 2,873,887 units in 2024. This increase was due to the loading and unloading of cars at the Tanjung Priok, Pontianak, and Makassar Ports due to increased loading and unloading and imports of vehicles, including electric vehicles (EVs). Furthermore, roll-on/roll-off (RoRo) ship services experienced significant growth at ports including Tanjung Perak, Lembar, Tanjung Wangi, and Tenau Kupang.

Realisasi arus barang non petikemas dalam satuan MMBTU tahun 2025 mencapai 15.943.575 MMBTU, meningkat 14,12% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai 13.971.183 MMBTU. Peningkatan ini yang didorong oleh pertumbuhan kebutuhan energi listrik di sektor industri, hotel, dan restoran yang sejalan dengan peningkatan penjualan listrik PLN Bali, serta optimalisasi penyaluran gas oleh PGN yang memperluas jaringan pelanggan komersial di Bali.

The non-containerized goods traffic in mmbtu (mmbtu) in 2025 reached 15,943,575 mmbtu, a 14.12% increase compared to 13,971,183 mmbtu in 2024. This increase wasdue to the growing electricity demand in the industrial, hotel, and restaurant sectors, in line with increased electricity sales from PLN Bali, as well as PGN's optimization of gas distribution, which is expanding its commercial customer network in Bali.

Realisasi arus barang non petikemas dalam satuan Ekor tahun 2025 mencapai 787.682 Ekor mengalami kenaikan 6,48% dibandingkan tahun 2024 mencapai 739.717 Ekor. Peningkatan ini didukung oleh kebijakan pemerintah dalam mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan swasembada daging/susu melalui impor sapi di Pelabuhan Tanjung Priok dari Australia, Brasil dan Amerika Serikat. Selain itu, peningkatan tersebut juga disebabkan karena tingginya permintaan pada momentum keagamaan (Idul Adha) yang terjadi di Trisakti dan Kupang.

The non-containerized goods traffic in 2025 reached 787,682 units, a 6.48% increase compared to 739,717 units in 2024. This increase was due to government policies supporting the Free Nutritious Meals (MBG) program and meat/milk self-sufficiency through cattle imports at Tanjung Priok Port from Australia, Brazil, and the United States. Furthermore, the increase was also due to high demand during the religious holiday (Eid al-Adha) at Trisakti and Kupang.

ARUS PENUMPANG

Arus penumpang adalah jumlah penumpang yang melakukan aktivitas di pelabuhan yang dicatatkan dalam satuan orang. Pencatatan arus penumpang ini dibagi berdasarkan jenis kegiatan dan jenis rute pelayaran. Jenis kegiatan terdiri dari kegiatan penumpang naik ke atas kapal dan penumpang turun dari kapal. Sedangkan rute pelayaran adalah jenis rute kapal yang dibagi dalam rute pelayaran dalam negeri dan rute pelayaran luar negeri.

PASSENGER TRAFFIC

Passenger traffic reflects the number of passengers engaged in port activities, recorded in units of people. Passenger traffic recording is categorized by activity type and shipping route. The types of activities include boarding and disembarking passengers. While, shipping routes are types of ship routes, divided into domestic and international shipping routes.

Tabel Arus Penumpang
Passenger Traffic

Uraian Description	Satuan Unit	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
				(Nominal)	(%)
Luar Negeri Embarkation					
Embarkasi Embarkation	Orang	**913.159**	773.861	139.298	18,00%
Debarkasi Debarkation	Orang	**818.344**	691.402	126.942	18,36%
Jumlah Luar Negeri Total Overseas	Orang	**1.731.503**	1.465.263	266.240	18,17%

Tabel Arus Penumpang
Passenger Traffic

Uraian Description	Satuan Unit	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
				(Nominal)	(%)
Dalam Negeri Domestic					
Embarkasi Embarkation	Orang	**9.494.075**	8.998.716	495.359	5,50%
Debarkasi Debarkation	Orang	**9.208.991**	8.979.918	229.073	2,55%
Jumlah Dalam Negeri Total Domestic	Orang	**18.703.066**	17.978.634	724.432	4,03%
Jumlah Total	**Orang**	**20.434.569**	**19.443.897**	**990.672**	**5,10%**

Realisasi arus penumpang pada tahun 2025 sebesar 20.434.569 Orang, meningkat 5,10% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 19.443.897 Orang. Kenaikan tersebut dipengaruhi peningkatan aktivitas ekonomi di sektor pariwisata internasional dan domestik. Selain itu, sejalan dengan adanya peningkatan arus kapal akibat penambahan rute kapal RoRo Penumpang di beberapa wilayah sehingga berdampak pada trafik di Tanjung Perak, Lembar, Tanjung Wangi dan Trisakti.

Realized passenger traffic in 2025 is projected to reach 20,434,569 people, a 5.10% increase compared to 19,443,897 people the previous year. This increase is due to increased economic activity in the international and domestic tourism sectors. In addition, this increase is in line with the increase in ship traffic due to the addition of RoRo passenger ship routes in several areas, impacting traffic in Tanjung Perak, Lembar, Tanjung Wangi, and Trisakti.

JASA LAINNYA

Segmen Jasa Lainnya merupakan jasa pelayanan yang menunjang kegiatan yang ada di pelabuhan meliputi Pengusahaan Tanah, Bangunan, Air dan Listrik (TBAL) dan Fasilitas Rupa-Rupa.

OTHER SERVICES

The Other Services segment provides services that support port activities, including Land, Building, Water, and Electricity (TBAL) and Miscellaneous Facilities.

PENGUSAHAAN TANAH, BANGUNAN, AIR DAN LISTRIK (TBAL)

TBAL merupakan jasa persewaan lahan, bangunan, air bersih serta energi listrik.

LAND, BUILDING, WATER, AND ELECTRICITY CONTROL (TBAL)

TBAL is a rental service for land, buildings, clean water,

Tabel Produksi Pengusahaan Tanah, Bangunan, Air dan Listrik (TBAL)
Land, Buildings, Water, and Electricity (TBAL)Production

Uraian Description	Satuan Unit	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
				(satuan) (nominal)	(%)
Pengusahaan Properti Property Operations					
Pengusahaan Lahan Land Concession					
Sewa Rental	M2	15.082.967	16.845.050	(1.762.083)	(10,46%)
Throughput Fee/Kontribusi Throughput Fee/Contribution	Ton	11.221.057	9.303.921	1.917.136	20,61%
Pengusahaan Bangunan Building Business	M2	756.559	1.076.382	(319.823)	(29,71%)

Tabel Produksi Pengusahaan Tanah, Bangunan, Air dan Listrik (TBAL)
Land, Buildings, Water, and Electricity (TBAL)Production

Uraian Description	Satuan Unit	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
				(satuan) (nominal)	(%)
Pengusahaan Air/Listrik Water/Electricity Business					
Pengusahaan Air Water Business	Ton	4.048.169	3.884.222	163.947	4,22%
Pengusahaan Listrik Electricity Business	KWH	47.691.326	44.599.514	3.091.812	6,93%

Pengusahaan Properti

Realisasi produksi pengusahaan properti untuk persewaan lahan di tahun 2025 dalam satuan M2 terealisasi 15.082.967 M2, menurun 10,46% dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar 16.845.050 M2. Realisasi pengusahaan bangunan di tahun 2025 terealisasi 756.559 Ton, menurun 29,71% dibandingkan tahun 2024 sebesar 1.076.382 Ton, hal ini disebabkan adanya perubahan pencatatan produksi di Trisakti atas pengusahaan gudang yang dicatat dalam kegiatan non petikemas. Realisasi throughput *fee*/kontribusi tahun 2025 terealisasi 11.221.057 Ton, meningkat 20,61% dibandingkan tahun 2024 sebesar 9.303.921 Ton yang disebabkan adanya peningkatan pemanfaatan tangki timbun CPO.

Pengusahaan Air

Realisasi produksi pengusahaan tahun 2025 dalam satuan Ton mencapai 4.048.169 Ton, meningkat 4,22% dibandingkan realisasi tahun 2024 yang mencapai 3.884.222 Ton. Peningkatan tersebut dipengaruhi penurunan pengisian air kapal khususnya untuk kapal luar negeri yang sejalan dengan adanya peningkatan kunjungan kapal luar negeri di dermaga umum.

Pengusahaan Listrik

Realisasi produksi pengusahaan listrik di tahun 2025 dalam satuan KWH mencapai 47.691.326 KWH, meningkat 6,93% dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar 44.599.514 KWH. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan pemakaian atas kegiatan *shore connection* dan *tenant* komersial.

Building Business

Realized production from property business for land rental in 2025, measured in M2, was 15,082,967 M2, a 10.46% decrease compared to 16,845,050 M2 in 2024. Realized production from building business in 2025 was 756,559 tons, a 29.71% decrease compared to 1,076,382 tons in 2024. This was due to changes in production records at Trisakti, which records warehouse operations as non-container activities. Realized throughput fees/ contributions in 2025 were 11,221,057 tons, a 20.61% increase compared to 9,303,921 tons in 2024, due to increased use of CPO storage tanks.

Water Business

The 2025 production realization in tons reached 4,048,169 tons, a 4.22% increase compared to the 2024 realization of 3,884,222 tons. This increase was due to a decrease in ship loading, particularly for foreign vessels, in line with the increase in foreign vessel calls at public wharves.

Electricity Business

The 2025 electricity production realized in kilowatt-hours reached 47,691,326 kilowatt-hours, a 6.93% increase compared to the 2024 realization of 44,599,514 kilowatt-hours. This was due to increased usage for shore connection activities and commercial tenants.

PELAYANAN JASA RUPA-RUPA

MISCELLANEOUS SERVICES

Tabel Produksi Pelayanan Jasa Rupa-Rupa
Miscellaneous Service Production

Uraian Description	Satuan Unit	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
				(satuan) (nominal)	(%)
Pas Terminal Penumpang Passenger Terminal Pass					
Pas Penumpang Passenger Pass	Lembar	10.166.139	9.574.965	591.174	6,17%

Tabel Produksi Pelayanan Jasa Rupa-Rupa
Miscellaneous Service Production

Uraian Description	**Satuan** Unit	**2025**	**2024**	**Pertumbuhan** Growth	
				(satuan) (nominal)	**(%)**
Pas Pelabuhan Harbor Pass					
Pas Harian Orang Daily Pass People	Lembar	1.716.182	2.060.524	(344.342)	(16,71%)
Pas Harian Kendaraan Daily Pass Vehicles	Lembar	24.082.511	23.786.707	295.804	1,24%

Jasa rupa-rupa antara lain meliputi pas terminal penumpang, pas pelabuhan dan produksi kerjasama.

Pas Terminal Penumpang

Realisasi pas penumpang di tahun 2025 dalam satuan Lembar mencapai 10.166.139 Lembar, meningkat 6,17% dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar 9.574.965 Lembar. Hal tersebut antara lain dipengaruhi oleh meningkatnya kegiatan kapal penumpang baik internasional (*cruise*) dan domestik serta kegiatan kapal RoRo.

Pas Pelabuhan

Realisasi pas harian orang di tahun 2025 dalam satuan Lembar mencapai 2.060.524 Lembar, menurun 16,71% dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar 2.060.524 Lembar. Namun pas harian kendaraan dalam satuan Lembar meningkat 1,24% dari 23.786.707 Lembar di tahun 2024 menjadi 24.082.511 Lembar di tahun 2025. Hal tersebut disebabkan adanya penggunaan paket layanan pas pelabuhan orang ke dalam kendaraan. Selain itu pas pelabuhan kendaraan mengalami peningkatan yang sejalan dengan capaian trafik barang yang bertumbuh.

PENDAPATAN DAN PROFITABILITAS SEGMEN USAHA

Total pendapatan operasi segmen tahun 2025 mencapai Rp36,73 triliun, meningkat 5,44% atau sebesar Rp1,89 triliun dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp34,83 triliun. Peningkatan ini terutama didorong oleh pertumbuhan pendapatan operasi jasa lainnya sebesar Rp1,37 triliun.

Sejalan dengan pertumbuhan pendapatan tersebut, laba tahun berjalan segmen operasi tahun 2025 mencapai Rp4,63 triliun, meningkat 14,73% atau sebesar Rp560,17 miliar dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai Rp3,80 triliun. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan laba dari segmen operasi pelabuhan sebesar Rp308,07 miliar.

Miscellaneous services include passenger terminal passes, port passes, and collaborative production.

Passenger Terminal Pass

Realized passenger passes in 2025 reached 10,166,139, a 6.17% increase compared to 9,574,965 in 2024. This increase was due to the increase in passenger ship activity, both international (cruise) and domestic, as well as RoRo vessel activity.

Harbor Pass

Realized daily passes for people in 2025 reached 2,060,524, a 16.71% decrease compared to 2024. However, vehicle daily passes increased by 1.24%, from 23,786,707 in 2024 to 24,082,511 in 2025. This increase was due to the use of port pass packages for passengers and vehicles. In addition, vehicle port passes increased in line with the growth in freight traffic.

BUSINESS SEGMENT REVENUE AND PROFITABILITY

Total segment operating revenue in 2025 reached Rp36.73 trillion, an increase of 5.44%, or Rp1.89 trillion, compared to Rp34.83 trillion in 2024. This increase was mainly due to growth in other service operating revenue of Rp1.37 trillion.

In line with this revenue growth, the operating segment's profit for the year in 2025 reached Rp4.63 trillion, an increase of 14.73%, or Rp560.17 billion, compared to Rp3.80 trillion in 2024. This increase was due to profit growth from the port operations segment of Rp308.07 billion.

Tabel Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Operasi
Operating Segment Revenue and Profitability

Uraian Description	2025	
	Operasi Kepelabuhanan Port Operations	**Jasa Lainnya** Other Services
Pendapatan operasi segmen Operating segment revenues		
Pendapatan operasi eksternal External operating revenues	32.055.020.812	4.673.253.240
Pendapatan operasi antar segmen Inter-segment operating revenues	13.722.399.025	4.941.671.566
Total pendapatan operasi segmen Total operating segment revenues	45.777.419.837	9.614.924.806
Beban operasi Operating expenses	(39.481.718.282)	(8.301.699.925)
Pendapatan operasi lainnya – neto Other operating revenues - net	1.450.211.062	137.658.434
Laba usaha Operating profit	7.745.912.617	1.450.883.315
Pendapatan keuangan Finance income	1.114.512.890	224.505.652
Beban keuangan Finance expenses	(2.726.459.827)	(1.187.636.683)
Bagian laba entitas asosiasi dan pengendalian bersama entitas – neto Share of profits of associates and joint control entities - net	3.921.874.542	(775.902.325)
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan badan Income before final tax and corporate income tax	10.055.840.222	(288.150.041)
Beban pajak final Final tax expense	(400.998.153)	(215.724.804)
Laba sebelum pajak penghasilan badan Profit before corporate income tax	9.654.842.069	(503.874.845)
Pajak penghasilan badan Corporate income tax expense		
Kini Current	(996.262.742)	(151.629.502)
Tangguhan Deferred	484.211.746	(70.586.422)
Laba tahun berjalan Profit for the year	9.142.791.073	(726.090.769)
Posisi keuangan Financial position		
Aset segmen Segment Assets	156.444.764.965	27.650.419.557
Liabilitas segmen Segment liabilities	73.882.130.861	21.068.725.356
Penyusutan dan amortisasi segmen Segment depreciation and amortization	(3.904.993.250)	(412.809.663)

Total Sebelum Eliminasi Total Before Elimination	Eliminasi Elimination	Total
36.728.274.052	-	36.728.274.052
18.664.070.591	(18.664.070.591)	-
55.392.344.643	(18.664.070.591)	36.728.274.052
(47.783.418.207)	19.194.594.588	(28.588.823.619)
1.587.869.496	(2.268.812.940)	(680.943.444)
9.196.795.932	(1.738.288.943)	7.458.506.989
1.339.018.542	(438.754.079)	900.264.463
(3.914.096.510)	947.359.950	(2.966.736.560)
3.145.972.217	(2.712.909.025)	433.063.192
9.767.690.181	(3.942.592.097)	5.825.098.084
(616.722.957)	(113.903.967)	(730.626.924)
9.150.967.224	(4.056.496.064)	5.094.471.160
(1.147.892.244)	3.101.533	(1.144.790.711)
413.625.324	-	413.625.324
8.416.700.304	(4.053.394.531)	4.363.305.773
184.095.184.522	58.040.378.803	126.054.805.719
94.950.856.217	19.253.654.264	75.697.201.953
(4.317.802.913)	504.503.523	(3.813.299.390)

Uraian Description	2024	
	Operasi Kepelabuhanan Port Operations	Jasa Lainnya Other Services
Pendapatan operasi segmen Operating Segment revenues		
Pendapatan operasi eksternal External operating revenues	32.861.740.492	1.972.127.966
Pendapatan operasi antar segmen Inter-segment operating revenues	13.757.494.049	6.273.716.448
Total pendapatan operasi segmen Total operating segment revenues	46.619.234.541	8.245.844.414
Beban operasi Operating expenses	(41.020.591.449)	(7.077.809.924)
Pendapatan operasi lainnya – neto Other operating revenues - net	751.221.656	102.401.123
Laba usaha Operating revenues	6.349.864.748	1.270.435.613
Pendapatan keuangan Finance income	1.051.453.129	135.434.136
Beban keuangan Finance expenses	(2.649.296.184)	(1.129.306.759)
Bagian laba entitas asosiasi dan pengendalian bersama entitas – neto Share of profits of associates and joint control entities - net	4.809.086.580	(545.425.791)
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan badan Income before final tax and corporate income tax	9.561.108.273	(268.862.801)
Beban pajak final Final tax expense	(532.105.844)	(151.134.587)
Laba sebelum pajak penghasilan badan Income before corporate income tax	9.029.002.429	(419.997.388)
Pajak penghasilan badan Corporate income tax expense		
Kini Current	(751.628.536)	(135.136.152)
Tangguhan Deferred	557.345.827	150.469.422
Laba tahun berjalan Income for the year	8.834.719.720	(404.664.118)
Posisi keuangan Financial position		
Aset segmen Segment Assets	152.089.669.551	21.461.234.382
Liabilitas segmen Segment liabilities	76.010.889.283	21.864.857.772
Penyusutan dan amortisasi segmen Segment depreciation and amortization	(3.937.721.458)	(323.319.149)

Total Sebelum Eliminasi Total Before Elimination	Eliminasi Elimination	Total
34.833.868.458	-	34.833.868.458
20.031.210.497	(20.031.210.497)	-
54.865.078.955	(20.031.210.497)	34.833.868.458
(48.098.401.373)	19.741.900.099	(28.356.501.274)
853.622.779	(1.044.231.385)	(190.608.606)
7.620.300.361	(1.333.541.783)	6.286.758.578
1.186.887.265	(348.006.036)	838.881.229
(3.778.602.943)	773.915.221	(3.004.687.722)
4.263.660.789	(3.723.105.670)	540.555.119
9.292.245.472	(4.630.738.268)	4.661.507.204
(683.240.431)	3.177.162	(680.063.269)
8.609.005.041	(4.627.561.106)	3.981.443.935
(886.764.688)	642.849	(886.121.839)
707.815.249	-	707.815.249
8.430.055.602	(4.626.918.257)	3.803.137.345
173.550.903.933	(46.043.168.174)	127.507.735.759
97.875.747.055	(20.554.864.045)	77.320.883.010
(4.261.040.607)	484.805.792	(3.776.234.815)

Uraian Description	Pertumbuhan 2024-2025 (dalam nilai Rupiah) Growth 2024-2025 (in Rupiah)	
	Operasi Kepelabuhanan Port Operations	Jasa Lainnya Other Services
Pendapatan operasi segmen Operating segment revenues		
Pendapatan operasi eksternal External operating revenues	(806.719.680)	2.701.125.274
Pendapatan operasi antar segmen Inter-segment operating revenues	(35.095.024)	(1.332.044.882)
Total pendapatan operasi segmen Total operating segment revenues	(841.814.704)	1.369.080.392
Beban operasi Operating expenses	1.538.873.167	(1.223.890.001)
Pendapatan operasi lainnya – neto Other operating revenues - net	698.989.406	35.257.311
Laba usaha Operating profit	1.396.047.869	180.447.702
Pendapatan keuangan Finance income	63.059.761	89.071.516
Beban keuangan Finance expenses	(77.163.643)	(58.329.924)
Bagian laba entitas asosiasi dan pengendalian bersama entitas – neto Share of profits of associates and joint control entities - net	(887.212.038)	(230.476.534)
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan badan Income before final tax and corporate income tax	494.731.949	(19.287.240)
Beban pajak final Final tax expense	131.107.691	(64.590.217)
Laba sebelum pajak penghasilan badan Profit before corporate income tax	625.839.640	(83.877.457)
Pajak penghasilan badan Corporate income tax expense		
Kini Current	(244.634.206)	(16.493.350)
Tangguhan Deferred	(73.134.081)	(221.055.844)
Laba tahun berjalan Profit for the year	308.071.353	(321.426.651)
Posisi keuangan Financial position		
Aset segmen Segment Assets	4.355.095.414	6.189.185.175
Liabilitas segmen Segment liabilities	(2.128.758.422)	(796.132.416)
Penyusutan dan amortisasi segmen Segment depreciation and amortization	32.728.208	(89.490.514)

Total Sebelum Eliminasi Total Before Elimination	Eliminasi Elimination	Total
1.894.405.594	-	1.894.405.594
(1.367.139.906)	1.367.139.906	-
527.265.688	1.367.139.906	1.894.405.594
314.983.166	(547.305.511)	(232.322.345)
734.246.717	(1.224.581.555)	(490.334.838)
1.576.495.571	(404.747.160)	1.171.748.411
152.131.277	(90.748.043)	61.383.234
(135.493.567)	173.444.729	37.951.162
(1.117.688.572)	1.010.196.645	(107.491.927)
475.444.709	688.146.171	1.163.590.880
66.517.474	(117.081.129)	(50.563.655)
541.962.183	571.065.042	1.113.027.225
(261.127.556)	2.458.684	(258.668.872)
(294.189.925)	#VALUE!	(294.189.925)
(13.355.298)	573.523.726	560.168.428
10.544.280.589	104.083.546.977	(1.452.930.040)
(2.924.890.838)	39.808.518.309	(1.623.681.057)
(56.762.306)	19.697.731	(37.064.575)

Uraian Description	Pertumbuhan 2024-2025 (dalam %) Growth 2024-2025 (in %)	
	Operasi Kepelabuhanan Port Operations	Jasa Lainnya Other Services
Pendapatan operasi segmen Operating segment revenues		
Pendapatan operasi eksternal External operating revenues	(2,45%)	136,97%
Pendapatan operasi antar segmen Inter-segment operating revenues	(0,26%)	(21,23%)
Total pendapatan operasi segmen Total operating segment revenues	(1,81%)	16,60%
Beban operasi Operating expenses	(3,75%)	17,29%
Pendapatan operasi lainnya – neto Other operating revenues - net	93,05%	34,43%
Laba usaha Operating profit	21,99%	14,20%
Pendapatan keuangan Finance income	6,00%	65,77%
Beban keuangan Finance expenses	2,91%	5,17%
Bagian laba entitas asosiasi dan pengendalian bersama entitas – neto Share of profits of associates and joint control entities - net	(18,45%)	42,26%
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan badan Income before final tax and corporate income tax	5,17%	7,17%
Beban pajak final Final tax expense	(24,64%)	42,74%
Laba sebelum pajak penghasilan badan Profit before corporate income tax	6,93%	19,97%
Pajak penghasilan badan Corporate income tax expense		
Kini Current	32,55%	12,20%
Tangguhan Deferred	(13,12%)	(146,91%)
Laba tahun berjalan Profit for the year	3,49%	79,43%
Posisi keuangan Financial position		
Aset segmen Segment Assets	2,86%	28,84%
Liabilitas segmen Segment liabilities	(2,80%)	(3,64%)
Penyusutan dan amortisasi segmen Segment depreciation and amortization	(0,83%)	27,68%

Total Sebelum Eliminasi Total Before Elimination	Eliminasi Elimination	Total
5,44%	-	5,44%
(6,83%)	(6,83%)	-
0,96%	(6,83%)	5,44%
(0,65%)	(2,77%)	0,82%
86,02%	117,27%	257,25%
20,69%	30,35%	18,64%
12,82%	26,08%	7,32%
3,59%	22,41%	(1,26%)
(26,21%)	(27,13%)	(19,89%)
5,12%	(14,86%)	24,96%
(9,74%)	(3.685,09%)	7,44%
6,30%	(12,34%)	27,96%
29,45%	382,47%	29,19%
(41,56%)	-	(41,56%)
(0,16%	(12,40%)	14,73%
6,08%	(226,06%)	(1,14%)
(2,99%)	(193,67%)	(2,10%)
1,33%	4,06%	0,98%

KINERJA ENTITAS ANAK PELINDO

Uraian kinerja entitas anak Pelindo disajikan sebagai berikut.

PT PELINDO TERMINAL PETIKEMAS

PELINDO SUBSIDIARY PERFORMANCE

The performance of Pelindo's subsidiaries is shown below.

PT PELINDO TERMINAL PETIKEMAS

Tabel Kinerja Keuangan PT Pelindo Terminal Petikemas
PT Pelindo Terminal Petikemas Financial Performance

(dalam jutaan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)	(5) = (4)/(3)
Pendapatan usaha Operating revenues	**15.425.327**	13.786.911	1.638.416	11,88%
Beban usaha Operating expenses	**(12.633.399)**	(11.036.066)	(1.597.333)	14,47%
Laba (rugi) usaha Operating Profit (Loss)	**2.791.928**	2.750.844	41.084	1,49%
Laba (rugi) bersih Net Profit (Loss)	**2.256.715**	2.595.442	(338.727)	(13,05%)

Pendapatan Usaha

Pendapatan usaha tahun 2025 terealisasi sebesar Rp15,43 triliun atau meningkat 11,88% dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp13,79 triliun. Beberapa hal yang mempengaruhi peningkatan pendapatan usaha tahun 2025 adalah:

1. Peningkatan pendapatan pelayanan kapal dan lainnya sejalan dengan kenaikan trafik kapal di tahun 2025.
2. Peningkatan pendapatan pelayanan petikemas yang disebabkan adanya kenaikan trafik petikemas dan kenaikan nilai tukar US Dollar sehingga pendapatan pelayanan petikemas mengalami peningkatan.
3. Peningkatan pendapatan barang non petikemas dipengaruhi oleh tercapainya pendapatan barang non petikemas terkait handling bongkar muat barang PKE milik PT Karya Serasi Jaya Abadi (KSJA) di PT Prima Multi Terminal (PMT).
4. Peningkatan pendapatan pengusahaan properti, air dan listrik dikarenakan penyesuaian pencatatan pendapatan PT IPC TPK terkait rental fee TSJ, MAL dan sewa lapangan untuk PNP yang sebelumnya tercatat sebagai pendapatan kerjasama pelabuhan menjadi pendapatan properti.

Operating Revenues

Operating revenues in 2025 reached Rp15.43 trillion, an 11.88% increase compared to Rp13.79 trillion in 2024. The factors influencing the increase in operating revenues in 2025 included :

1. Increased revenues from ship services and other services in line with increased ship traffic in 2025.
2. Increased revenues from container services due to increased container traffic and the strengthening US dollar exchange rate, which resulted in increased container service revenues.
3. The increase in non-container goods revenues due to achievement of non-container goods revenues related to the loading and unloading of PKE goods owned by PT Karya Serasi Jaya Abadi (KSJA) at PT Prima Multi Terminal (PMT).
4. The increase in property, water, and electricity revenues was due to adjustments in recording revenues from PT IPC TPK related to rental fees for TSJ, MAL, and field leases for PNP, which were previously recorded as port cooperation revenues, to property revenues

Laba (Rugi) Bersih

Laba bersih tahun 2025 terealisasi sebesar Rp2,26 triliun atau menurun 13,05% dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp2,60 triliun. Hal ini dipengaruhi oleh adanya kenaikan trafik petikemas dan kenaikan nilai tukar US Dollar sehingga berdampak pada peningkatan laba entitas asosiasi tahun 2025.

Net Profit (Loss)

Net profit for 2025 was projected to reach Rp2.26 trillion, a decrease of 13.05% compared to Rp2.06 trillion in 2024. This was due to increased container traffic and the US dollar exchange rate, which impacted the associated entity's profit in 2025.

PT PELINDO MULTI TERMINAL

PT PELINDO MULTI TERMINAL

Tabel Kinerja Keuangan PT Pelindo Multi Terminal
PT Pelindo Multi Terminal Financial Performance

(dalam jutaan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)	(5) = (4)/(3)
Pendapatan usaha Operating revenues	**5.669.657**	5.302.162	367.495	6,93%
Beban usaha Operating expenses	**(5.059.521)**	(5.021.281)	(38.240)	0,76%
Laba (rugi) usaha Operating Profit (Loss)	**610.136**	280.881	329.255	117,22%
Laba (rugi) bersih Net Profit (Loss)	**525.359**	269.755	255.604	94,75%

Pendapatan Usaha

Pendapatan usaha tahun 2025 terealisasi sebesar Rp5,67 triliun, meningkat 6,93% dari realisasi tahun 2024 yang sebesar Rp5,30 triliun. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya tambahan pendapatan dari *branch* Sibolga, Tanjung Pinang dan Bima yang STO tahap 3 Tahun 2024, peningkatan *throughput* domestik dan internasional disebabkan adanya peralihan kemasan kargo semen di *branch* Dumai, dan peningkatan pada *branch* Pare.

Laba (Rugi) Bersih

Laba bersih tahun 2025 terealisasi sebesar Rp525,36 miliar, meningkat 94,75% dari realisasi tahun 2024 yang sebesar Rp269,76 miliar. Peningkatan laba bersih tersebut dipengaruhi oleh kenaikan pendapatan usaha yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan kenaikan beban usaha pada tahun 2025.

Operating Revenues

Revenue for 2025 amounted to Rp5.67 trillion, an increase of 6.93% from the 2024 figure of Rp5.30 trillion. This increase was due to additional revenue from the Sibolga, Tanjung Pinang, and Bima branches, which entered into Phase 3 of the 2024 STO, increased domestic and international throughput due to the shift in cement cargo packaging at the Dumai branch, and increased operating expenses at the Pare branch.

Net Profit (Loss)

Net profit for 2025 amounted to Rp525.36 billion, an increase of 94.75% from the 2024 figure of Rp269.76 billion. This increase in net profit was due to a higher increase in operating revenue compared to the increase in operating expenses in 2025.

PT PELINDO SOLUSI LOGISTIK

PT PELINDO SOLUSI LOGISTIK

Tabel Kinerja Keuangan PT Pelindo Solusi Logistik
PT Pelindo Solusi Logistik Financial Performance

(dalam jutaan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)	(5) = (4)/(3)
Pendapatan usaha Operating revenues	**2.413.100**	2.440.409	(27.309)	(1,12%)
Beban usaha Operating expenses	**(1.650.104)**	(1.630.780)	(19.324)	1,18%
Laba (rugi) usaha Operating Profit (Loss)	**762.996**	773.301	(10.305)	(1,33%)
Laba (rugi) bersih Net Profit (Loss)	**(340.517)**	(84.258)	(256.259)	304,14%

Pendapatan Usaha

Pendapatan usaha tahun 2025 terealisasi sebesar Rp2,41 triliun, turun 1,12% dibandingkan realisasi tahun 2024 yang sebesar Rp2,44 triliun. Hal ini utamanya disebabkan oleh turunnya pendapatan rupa-rupa usaha sejalan dengan tidak terdapat pengelolaan binis pemeliharaan alat per April 2025 di PT PMP dan PT MTI tidak lagi membukukan pendapatan MAL dimana untuk tahun 2024 masih membukukan pendapatan Januarisampai dengan Maret 2024, serta pada tahun 2024 masih membukukan pendapatan penyediaan jasa tenaga kerja sebesar Rp156 miliar di PT MTI.

Laba (Rugi) Bersih

Rugi bersih tahun 2025 terealisasi sebesar Rp340,52 miliar, meningkat 304,14% dari realisasi rugi tahun 2024 sebesar Rp84,26 miliar. Hal ini antara lain dipengaruhi peningkatan beban usaha yang disebabkan kenaikan pemeliharaan, beban bahan untuk keperluan bisnis Hi-Co Scan serta peningkatan beban penyusutan dan asuransi yang disebabkan aset JTCC di PT API.

Operating Revenues

Revenue for 2025 amounted to Rp2.41 trillion, a decrease of 1.12% compared to the 2024 figure of Rp2.44 trillion. This decrease was primarily due to a decrease in miscellaneous revenues, as PT PMP ceased operating the equipment maintenance business as of April 2025. PT MTI no longer recorded MAL revenue, which still recorded revenue for the January to March 2024 period. Furthermore, PT MTI recorded revenue from labor services of Rp156 billion in 2024.

Net Profit (Loss)

The net loss for 2025 amounted to Rp340.52 billion, an increase of 304.14% from the net loss of Rp84.26 billion recorded in 2024. This was due to increased operating expenses due to increased maintenance, material costs for Hi-Co Scan business needs, and increased depreciation and insurance expenses due to JTCC assets at PT API.

PT PELINDO JASA MARITIM

PT PELINDO JASA MARITIM

Tabel Kinerja Keuangan PT Pelindo Jasa Maritim
PT Pelindo Jasa Maritim Financial Performance

(dalam jutaan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)	(5) = (4)/(3)
Pendapatan usaha Operating revenues	**8.750.102**	7.268.679	1.481.423	20,38%
Beban usaha Operating expenses	**(7.837.034)**	(6.636.709)	(1.200.325)	18,09%
Laba (rugi) usaha Operating Profit (Loss)	**913.068**	516.057	397.011	76,93%
Laba (rugi) bersih Net Profit (Loss)	**497.918**	329.782	168.136	50,98%

Pendapatan Usaha

Pendapatan usaha tahun 2025 mencapai Rp8,75 triliun, meningkat 20,38% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp7,27 triliun. Hal tersebut dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan beberapa sektor bisnis seperti pengusahaan listrik, pemeliharaan fasilitas pelabuhan (faspel), serta pemanduan dan penundaan di beberapa wilayah.

Laba (Rugi) Bersih

Laba bersih tahun 2025terealisasi sebesar Rp497,91 miliar, meningkat 50,98% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp329,78 miliar. Hal ini disebabkan *operating ratio* masih dapat dikendalikan di bawah RKAP, dan dijaga pada level realisasi tahun sebelumnya, disertai dengan pertumbuhan pendapatan dibandingkan tahun lalu.

Operating Revenues

Revenue for 2025 is projected to reach Rp8.75 trillion, an increase of 20.38% compared to Rp7.27 trillion in 2024. This increase was due to increased revenue from several business sectors, such as electricity generation, port facility maintenance (faspel), and pilotage and towing in several regions.

Net Profit (Loss)

Net profit for 2025 amounted to Rp497.91 billion, an increase of 50.98% compared to Rp329.78 billion in 2024. This was due to the operating ratio remaining within the Company's Work Plan and Budget (RKAP) and being maintained at the previous year's level, coupled with revenue growth compared to the previous year.

PT PELABUHAN INDONESIA INVESTAMA

PT PELABUHAN INDONESIA INVESTAMA

Tabel Kinerja Keuangan PT Pelabuhan Indonesia Investama
PT Pelabuhan Indonesia Investama Financial Performance

(dalam jutaan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)	(5) = (4)/(3)
Pendapatan usaha Operating revenues	**94.120**	97.755	(3.635)	(3,72%)
Beban usaha Operating expenses	**9.403**	(8.593)	17.996	(209,43%)
Laba (rugi) usaha Operating Profit (Loss)	**84.717**	89.162	(4.445)	(4,99%)

Tabel Kinerja Keuangan PT Pelabuhan Indonesia Investama
PT Pelabuhan Indonesia Investama Financial Performance

(dalam jutaan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)	(5) = (4)/(3)
Laba (rugi) bersih Net Profit (Loss)	**1.236**	3.371	(2.135)	(63,33%)

Pendapatan Usaha

Pendapatan usaha tahun 2025 terealisasi sebesar Rp94,12 miliar, menurun 3,72% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp97,76 miliar. Hal ini dipengaruhi oleh penurunan pendapatan atas kupon obligasi sejalan dengan adanya kegiatan aksi korporasi terhadap PII.

Laba (Rugi) Bersih

Laba bersih tahun 2025 terealiasi sebesar Rp1,24 miliar, menurun 63,33% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp3,37 miliar. Hal ini antara lain disebabkan adanya realisasi penjualan obligasi, meningkatnya pendapatan atas kupon obligasi seiring dengan penambahan kepemilikan jumlah portofolio obligasi dan penurunan biaya di beberapa alokasi biaya.

Operating Revenues

Operating revenue in 2025 amounted to Rp94.12 billion, a decrease of 3.72% compared to Rp97.76 billion in 2024. This was due to a decrease in bond coupon income in line with corporate actions regarding PII.

Net Profit (Loss)

Net profit in 2025 amounted to Rp1.24 billion, a decrease of 63.33% compared to Rp3.37 billion in 2024. This was due to the realization of bond sales, increased bond coupon income in line with the increase in bond portfolio ownership, and decreased costs in several cost allocations.

PT INTEGRASI LOGISTIK CIPTA SOLUSI LOGISTIK

PT INTEGRASI LOGISTIK CIPTA SOLUSI LOGISTIK

Tabel Kinerja Keuangan PT Integrasi Logistik Cipta Solusi Logistik
PT Integrasi Logistik Cipta Solusi Logistik Financial Performance

(dalam jutaan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)	(5) = (4)/(3)
Pendapatan usaha Operating revenues	**941.482**	792.393	149.089	18,82%
Beban usaha Operating expenses	**837.189**	(725.008)	1.562.197	(215,47%)
Laba (rugi) usaha Operating Profit (Loss)	**104.293**	67.385	36.908	54,77%
Laba (rugi) bersih Net Profit (Loss)	**78.869**	56.425	22.444	39,78%

Pendapatan Usaha

Operating revenue for 2025 amounted to Rp941.48 billion, an increase of 18.82% compared to Rp792.39 billion in 2024. Hal ini didukung atas capaian dari segmen operasi Enterprise Digital Solution (EDS), Maritime Service Solution (MSS), dan Port Operating Solution (POS).

Laba (Rugi) Bersih

Laba bersih tahun 2025 terealisasi sebesar Rp78,87miliar, meningkat 39,78% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp56,43 miliar. Peningkatan laba bersih ini menunjukkan terdapat peningkatan performa bisnis dan efisiensi beban operasional pada ILCS dibandingkan dengan realisasi tahun 2024.

KSO TERMINAL PETIKEMAS KOJA

Operating Revenues

Operating revenue for 2025 amounted to Rp941.48 billion, an increase of 18.82% compared to Rp792.39 billion in 2024. This increase was supported by achievements in the Enterprise Digital Solution (EDS), Maritime Service Solution (MSS), and Port Operating Solution (POS) operating segments.

Net Profit (Loss)

Net profit in 2025 amounted to Rp78.87 billion, an increase of 39.78% compared to Rp56.43 billion in 2024. This increase in net profit demonstrates improved business performance and operational cost efficiency at ILCS compared to 2024.

KSO TERMINAL PETIKEMAS KOJA

Tabel Kinerja Keuangan KSO Terminal Petikemas Koja
KSO Terminal Petikemas Koja Financial Performance

(dalam jutaan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)	(5) = (4)/(3)
Pendapatan usaha Operating revenues	**1.009.045**	1.818.452	(809.407)	(44,51%)
Beban usaha Operating expenses	**(613.726)**	(1.116.253)	502.527	(45,02%)
Laba (rugi) usaha Operating Profit (Loss)	**395.319**	702.200	(306.881)	(43,70%)
Laba (rugi) bersih Net Profit (Loss)	**296.343**	377.332	(80.989)	(21,46%)

Pendapatan Usaha

Pendapatan usaha tahun 2025 terealisasi sebesar Rp1,01 triliun, menurun 44,51% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp1,82 triliun. Penurunan tersebut antara lain disebabkan oleh menurunnya *throughput*.

Laba (Rugi) Bersih

Laba bersih tahun 2025 terealisasi sebesar Rp296,34 miliar, menurun 21,46% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp377,33 miliar. Penurunan laba bersih tersebut sejalan dengan penurunan pendapatan usaha pada tahun 2025.

Operating Revenue

Operating revenue for 2025 amounted to Rp1.01 trillion, a decrease of 44.51% compared to Rp1.82 trillion in 2024. This decline was due, in part, to a decrease in throughput.

Net Profit (Loss)

Net profit in 2025 amounted to Rp296.34 billion, a decrease of 21.46% compared to Rp377.33 billion in 2024. This decline in net profit is in line with the decrease in operating revenue in 2025.

PT PENDIDIKAN MARITIM DAN LOGISTIK INDONESIA

PT PENDIDIKAN MARITIM DAN LOGISTIK INDONESIA

Tabel Kinerja Keuangan PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia
PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia Financial Performance

(dalam jutaan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)	(5) = (4)/(3)
Pendapatan usaha Operating revenues	**2.173.746**	1.993.635	180.111	9,03%
Beban usaha Operating expenses	**2.086.805**	(1.890.940)	3.977.745	(210,36%)
Laba (rugi) usaha Operating Profit (Loss)	**86.941**	102.694	(15.753)	(15,34%)
Laba (rugi) bersih Net Profit (Loss)	**70.605**	75.395	(4.790)	(6,35%)

Pendapatan Usaha

Pendapatan usaha tahun 2025 terealisasi sebesar Rp2,17 triliun, meningkat 9,03% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp1,99 triliun. Hal ini di sebabkan oleh terealisasinya kegiatan pelatihan baik dari Lingkungan Pelindo Grup maupun dari eksternal seperti kegiatan Pelatihan Pandu, ICOFR dari berbagai Perusahaan BUMN di Indonesia serta peningkatan UMK tahun 2025.

Operating Revenue

Operating revenue for 2025 amounted to Rp2.17 trillion, an increase of 9.03% compared to Rp1.99 trillion in 2024. This increase was driven by training activities conducted both within the Pelindo Group and externally, such as the Scout Training program and the International Coast Guard Training (ICOFR) from state-owned enterprises in Indonesia, as well as an increase in the minimum wage (MSE) in 2025.

Laba (Rugi) Bersih

Laba bersih tahun 2025 terealisasi sebesar Rp70,61 miliar, menurun 6,35% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp75,40 miliar. Penurunan laba antara lain dipengaruhi kenaikan beban di PT Pelindo Daya Sejahtera.

Net Profit (Loss)

Net income for 2025 amounted to Rp70.61 billion, a decrease of 6.35% from the 2024 figure of Rp75.40 billion. The decline in profit was due, in part, to an increase in expenses at PT Pelindo Daya Sejahtera.

PT ELECTRONIC DATA INTERCHANGE INDONESIA

PT ELECTRONIC DATA INTERCHANGE INDONESIA

Tabel Kinerja Keuangan PT Electronic Data Interchange Indonesia
PT Electronic Data Interchange Indonesia Financial Performance

(dalam jutaan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)	(5) = (4)/(3)
Pendapatan usaha Operating revenues	**42.270**	72.105	(29.835)	(41,38%)
Beban usaha Operating expenses	**40.780**	(72.564)	113.344	(156,20%)

Tabel Kinerja Keuangan PT Electronic Data Interchange Indonesia
PT Electronic Data Interchange Indonesia Financial Performance

(dalam jutaan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)	(5) = (4)/(3)
Laba (rugi) usaha Operating Profit (Loss)	**1.490**	(459)	1.949	(424,62%)
Laba (rugi) bersih Net Profit (Loss)	**17.502**	1.154	16.348	1.416,64%

Pendapatan Usaha

Pendapatan usaha tahun 2025 terealisasi sebesar Rp42,27 miliar, menurun 41,38% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp72,11 miliar. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya kebijakan untuk lebih selektif dalam memilih kegiatan, terutama di sektor pemerintahan, yang memberikan margin yang baik di samping adanya penurunan proyek dari Pelindo Group.

Laba (Rugi) Bersih

Laba bersih tahun 2025 terealisasi sebesar Rp17,51 miliar, meningkat 1.416,64% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp1,15 miliar. Hal tersebut dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan di luar usaha yang meliputi penjualan aset-aset yang kurang produktif dan efisiensi biaya-biaya yang dilakukan.

Operating Revenues

Operating revenue for 2025 amounted to Rp42.27 billion, a decrease of 41.38% compared to Rp72.11 billion in 2024This decrease was due to a policy of being more selective in choosing activities, particularly in the government sector, which provides good margins, in addition to a decrease in projects from the Pelindo Group.

Net Profit (Loss)

Net profit in 2025 amounted to Rp17.51 billion, an increase of 1,416.64% compared to Rp1.15 billion in 2024. This increase was due to an increase in non-operating income, including the sale of less productive assets and cost efficiency measures.

PT PRIMA HUSADA CIPTA MEDAN

PT PRIMA HUSADA CIPTA MEDAN

Tabel Kinerja Keuangan PT Pelindo Husada Cipta Medan
PT Pelindo Husada Cipta Medan Financial Performance

(dalam jutaan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)	(5) = (4)/(3)
Pendapatan usaha Operating revenues	**59.362**	55.654	3.708	6,66%
Beban usaha Operating expenses	**(51.782)**	(47.583)	(4.199)	8,82%
Laba (rugi) usaha Operating Profit (Loss)	**7.580**	8.071	(491)	(6,08%)
Laba (rugi) bersih Net Profit (Loss)	**4.460**	4.555	(95)	(2,09%)

Pendapatan Usaha

Pendapatan usaha tahun 2025 terealisasi sebesar Rp59,36 miliar, meningkat 6,66% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp55,65 miliar. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya kenaikan jumlah pasien BPJS dan pelayanan MCU serta kenaikan tarif JPKP.

Laba (Rugi) Bersih

Laba bersih tahun 2025 terealisasi sebesar Rp4,46 miliar, menurun dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp4,55 miliar. Hal tersebut antara lain dipengaruhi oleh kenaikan beban usaha di tahun 2025.

Operating Revenues

Operating revenue for 2025 amounted to Rp59.36 billion, an increase of 6.66% compared to Rp55.65 billion in 2024. This increase was due to an increase in the number of BPJS patients and MCU services, as well as an increase in JPKP rates.

Net Profit (Loss)

Net profit in 2025 amounted to Rp4.46 billion, down from Rp4.55 billion in 2024. This was due, in part, to an increase in operating expenses in 2025.

Tinjauan Keuangan
Financial Review

Tinjauan keuangan yang diuraikan berikut mengacu kepada Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 yang disajikan dalam Laporan Tahunan ini. Laporan Keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja dan mendapat opini menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Pelabuhan Indonesia dan entitas anaknya (secara kolektif disebut sebagai "Grup") tanggal 31 Desember 2025 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

The financial review described below refers to the Financial Statements for the year ended December 31, 2025, presented in this Annual Report. The Financial Statements have been audited by the Public Accounting Firm Purwanto Susanti and Surja and received an opinion that they were fair in all material respects, the consolidated financial position of PT Pelabuhan Indonesia and its subsidiaries (collectively referred to as the "Group") as of December 31, 2025, and their consolidated financial performance and cash flows for the year were in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

KINERJA KEUANGAN

Kinerja keuangan Perseroan terdiri atas kinerja Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif serta Laporan Arus Kas Konsolidasian disajikan sebagai berikut.

FINANCIAL PERFORMANCE

The Company's financial performance, consists of the Consolidated Statement of Financial Position, Statement of Profit or Loss and Comprehensive Income, and Consolidated Statement of Cash Flows, as presented as follows.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

Tabel Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
Consolidated Statement of Financial Position

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
ASET ASSETS				
ASET LANCAR CURRENT ASSETS				
Kas dan setara kas Cash and cash equivalents	**15.567.392.704**	20.352.943.946	(4.785.551.242)	(23,51%)
Investasi jangka pendek Short-term investments	**264.233.122**	375.942.057	(111.708.935)	(29,71%)
Piutang usaha – neto Trade receivables - net				
Pihak ketiga Third parties	**1.461.815.335**	1.557.342.021	(95.526.686)	(6,13%)
Pihak berelasi Related parties	**468.936.129**	455.819.901	13.116.228	2,88%
Piutang lain-lain – neto Other receivables, net				

Tabel Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
Consolidated Statement of Financial Position

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pihak ketiga Third parties	**56.625.405**	26.776.429	29.848.976	111,47%
Pihak berelasi Related parties	**149.634.818**	154.908.237	(5.273.419)	(3,40%)
Uang muka dan beban dibayar di muka Advances and prepaid expenses	**561.941.006**	413.926.915	148.014.091	35,76%
Aset kontrak Contract Assets				
Pihak ketiga Third parties	**42.821.660**	105.072.119	(62.250.459)	(59,25%)
Pihak berelasi Related parties	**194.673.861**	174.234.826	20.439.035	11,73%
Persediaan Inventories	**310.200.546**	277.992.453	32.208.093	11,59%
Pajak dibayar di muka Prepaid taxes	**815.689.473**	774.443.272	41.246.201	5,33%
Aset lancar lainnya Other current assets	**1.555.904.807**	1.342.811.421	213.093.386	15,87%
Total Aset Lancar Total Current Assets	**21.449.868.866**	26.012.213.597	(4.562.344.731)	(17,54%)
ASET TIDAK LANCAR NON-CURRENT ASSETS				
Investasi jangka panjang Long-term investments	**4.496.780.394**	5.012.419.887	(515.639.493)	(10,29%)
Properti investasi – neto Investment properties - net	**2.105.464.893**	1.323.604.656	781.860.237	59,07%
Aset tetap – neto Fixed assets - net	**42.263.350.916**	41.042.837.467	1.220.513.449	2,97%
Aset kerjasama operasi – neto Joint operation assets - net	**364.526.924**	368.258.512	(3.731.588)	(1,01%)
Aset hak guna - neto Right-of-use assets - net	**827.239.304**	786.222.536	41.016.768	5,22%
Aset pajak tangguhan Deferred tax assets	**2.239.828.188**	1.356.130.261	883.697.927	65,16%
Aset tak berwujud – neto Intangible assets - net	**42.897.155.187**	43.523.228.617	(626.073.430)	(1,44%)
Aset kontrak konsesi Concession contract assets	**6.635.265.469**	5.281.379.972	1.353.885.497	25,64%
Taksiran tagihan restitusi pajak Estimated claims for tax refund	**851.589.996**	1.142.420.387	(290.830.391)	(25,46%)

Tabel Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
Consolidated Statement of Financial Position

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Aset tidak lancar lainnya Other non-current assets	1.923.735.582	1.659.019.867	264.715.715	15,96%
Total Aset Tidak Lancar **Total Non-current Assets**	**104.604.936.853**	**101.495.522.162**	**3.109.414.691**	**3,06%**
TOTAL ASET **TOTAL ASSETS**	**126.054.805.719**	**127.507.735.759**	**(1.452.930.040)**	**(1,14%)**
LIABILITAS DAN EKUITAS **LIABILITIES AND EQUITY**				
LIABILITAS LIABILITIES				
LIABILITAS JANGKA PENDEK CURRENT LIABILITIES				
Utang usaha Trade payables				
Pihak ketiga Third parties	803.956.602	766.047.682	37.908.920	4,95%
Pihak berelasi Related parties	128.326.253	96.565.849	31.760.404	32,89%
Liabilitas kontrak jangka pendek Short-term contract liabilities	1.685.524.258	1.659.298.580	26.225.678	1,58%
Utang pajak Taxes payable	580.175.753	500.490.093	79.685.660	15,92%
Beban akrual Accrued expenses	9.414.369.377	6.666.411.251	2.747.958.126	41,22%
Bagian lancar atas: Current maturities of:				
Utang obligasi Bonds payable	49.988.389	18.446.568.351	(18.396.579.962)	(99,73%)
Utang bank jangka panjang Long-term bank loans	4.294.440.048	1.068.675.471	3.225.764.577	301,85%
Liabilitas sewa Lease liabilities	363.576.600	134.702.846	228.873.754	169,91%
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek Current employee benefit liabilities	429.519.134	463.764.537	(34.245.403)	(7,38%)
Liabilitas jangka pendek lainnya Other current liabilities				
Pihak ketiga Third parties	755.771.691	517.102.900	238.668.791	46,15%
Pihak berelasi Related parties	385.664.948	879.167.406	(493.502.458)	(56,13%)

Tabel Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
Consolidated Statement of Financial Position

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Total Liabilitas Jangka Pendek **Total Current Liabilities**	**18.891.313.053**	**31.198.794.966**	**(12.307.481.913)**	**(39,45%)**
LIABILITAS JANGKA PANJANG NON-CURRENT LIABILITIES				
Utang obligasi Bonds payable	**8.487.957.191**	8.249.264.237	238.692.954	2,89%
Utang bank Bank loans	**34.095.339.441**	23.447.068.879	10.648.270.562	45,41%
Liabilitas sewa Lease liabilities	**442.519.425**	775.556.684	(333.037.259)	(42,94%)
Utang lembaga keuangan non bank Loans from non-bank financial institutions				
Pihak ketiga Third parties	**-**	763.941.899	(763.941.899)	(100,00%)
Pihak berelasi Related parties	**-**	1.502.045.095	(1.502.045.095)	(100,00%)
Liabilitas pajak tangguhan Deferred tax liabilities	**84.857.757**	91.699.230	(6.841.473)	(7,46%)
Liabilitas kontrak jangka panjang Non-current contract liabilities	**5.069.291.460**	5.164.017.893	(94.726.433)	(1,83%)
Liabilitas jangka panjang lainnya Other Non-current liabilities	**955.431.661**	820.081.368	135.350.293	16,50%
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang Non-current employee benefit liabilities	**7.670.491.965**	5.308.412.758	2.362.079.207	44,50%
Total Liabilitas Jangka Panjang **Total Non-current Liabilities**	**56.805.888.900**	**46.122.088.044**	**10.683.800.856**	**23,16%**
TOTAL LIABILITAS **TOTAL LIABILITIES**	**75.697.201.953**	**77.320.883.010**	**(1.623.681.057)**	**(2,10%)**

Tabel Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
Consolidated Statement of Financial Position

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
EKUITAS EQUITY				
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Equity attributable to owners of the parent entity				
Modal saham Share capital	**40.575.584.000**	40.575.584.000	-	0,00%
Modal donasi Donated capital	**26.825.982**	26.825.982	-	0,00%
Tambahan modal disetor Additional paid-in capital	**(33.358.048.450)**	(33.358.048.450)	-	0,00%
Komponen ekuitas lainnya Other equity component	**1.466.121**	1.466.121	-	0,00%
Selisih nilai transaksi dengan pihak non pengendali Difference in value of transactions with non-controlling interest	**836.905.071**	836.905.071	-	0,00%
Saldo Laba Retained earnings				
Ditentukan penggunaannya Appropriated	**38.962.857.822**	37.079.792.756	1.883.065.066	5,08%
Belum ditentukan penggunaannya Unappropriated	**5.304.105.426**	4.726.606.443	577.498.983	12,22%
Penghasilan Komprehensif Lain Other comprehensive income	**(3.457.292.320)**	(1.792.048.331)	(1.665.243.989)	92,92%
Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk – Neto Equity attributable to owners of the parent entity – net	**48.892.403.652**	48.097.083.592	795.320.060	1,65%
Kepentingan Non-pengendali Non-controlling interests	**1.465.200.114**	2.089.769.157	(624.569.043)	(29,89%)
EKUITAS – NETO **EQUITY - NET**	**50.357.603.766**	**50.186.852.749**	**170.751.017**	**0,34%**
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS TOTAL LIABILITIES AND EQUITY	**126.054.805.719**	**127.507.735.759**	**(1.452.930.040)**	**(1,14%)**

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
Consolidated Statement of Financial Position

(dalam triliun Rupiah)
(in trilion Rupiah)

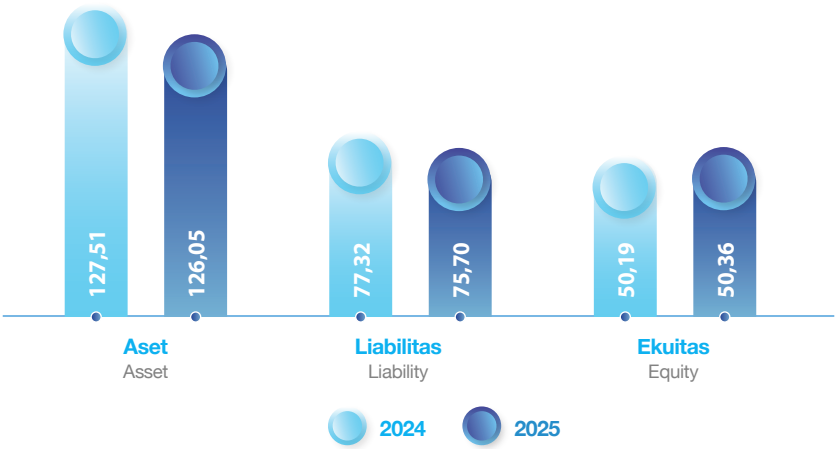

TOTAL ASET

Total aset tahun 2025 mencapai Rp126,05 triliun, menurun sebesar 1,14% dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp127,51 triliun. Penurunan tersebut terutama disebabkan turunnya aset lancar sebesar Rp4,56 triliun.

TOTAL ASSETS

Total assets in 2025 reached Rp126.05 trillion, a 1.14% decrease compared to Rp127.51 trillion in 2024. This decrease was mainly due to a decrease in current assets of Rp4.56 trillion.

Tabel Aset
Assets

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Aset lancar Current assets	**21.449.868.866**	26.012.213.597	(4.562.344.731)	(17,54%)
Aset tidak lancar Non-current assets	**104.604.936.853**	101.495.522.162	3.109.414.691	3,06%
Total aset Total assets	**126.054.805.719**	**127.507.735.759**	**(1.452.930.040)**	**(1,14%)**

ASET LANCAR

Aset lancar tahun 2025 mencapai Rp21,45 triliun, menurun 17,54% dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp20,01 triliun. Penurunan tersebut terutama disebabkan turunnya kas dan setara kas sebesar Rp4,79 triliun

CURRENT ASSETS

Current assets in 2025 reached Rp21.45 trillion, a 17.54% decrease compared to Rp20.01 trillion in 2024. This decrease was mainly due to a decrease in cash and cash equivalents of Rp4.79 trillion.

Tabel Aset Lancar
Current Assets

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	**2025**	**2024**	**Pertumbuhan** Growth	
			(Rp)	**(%)**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4) = (2)-(3)**	**(5) = (4)/(3)**
Kas dan setara kas Cash and cash equivalents	**15.567.392.704**	20.352.943.946	(4.785.551.242)	(23,51%)
Investasi jangka pendek Short-term investments	**264.233.122**	375.942.057	(111.708.935)	(29,71%)
Piutang usaha – neto Trade receivables, net				
Pihak ketiga Third parties	**1.461.815.335**	1.557.342.021	(95.526.686)	(6,13%)
Pihak berelasi Related parties	**468.936.129**	455.819.901	13.116.228	2,88%
Piutang lain-lain – neto Other receivables, net				
Pihak ketiga Third parties	**56.625.405**	26.776.429	29.848.976	111,47%
Pihak berelasi Related parties	**149.634.818**	154.908.237	(5.273.419)	(3,40%)
Uang muka dan beban dibayar di muka Advances and prepaid expenses	**561.941.006**	413.926.915	148.014.091	35,76%
Aset kontrak Contract Assets				
Pihak ketiga Third parties	**42.821.660**	105.072.119	(62.250.459)	(59,25%)
Pihak berelasi Related parties	**194.673.861**	174.234.826	20.439.035	11,73%
Persediaan Inventories	**310.200.546**	277.992.453	32.208.093	11,59%
Pajak dibayar di muka Prepaid taxes	**815.689.473**	774.443.272	41.246.201	5,33%
Aset lancar lainnya Other current assets	**1.555.904.807**	1.342.811.421	213.093.386	15,87%
Total Aset Lancar Total current assets	**21.449.868.866**	26.012.213.597	(4.562.344.731)	(17,54%)

KAS DAN SETARA KAS

Kas dan setara kas tahun 2025 mencapai Rp15,57 triliun, menurun 23,51% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai Rp20,35 triliun. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh turunnya kas yang berasal dari deposito berjangka sebesar Rp5,41 triliun.

CASH AND CASH EQUIVALENTS

Cash and cash equivalents reached Rp15.57 trillion in 2025, a 23.51% decrease compared to Rp20.35 trillion in 2024. This decrease was mainly due to a decrease in cash from time deposits of Rp5.41 trillion.

Tabel Kas dan Setara Kas
Cash and cash equivalents

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Kas Cash	**1.401.361**	1.710.015	(308.654)	(18,05%)
Bank Bank	**4.973.640.090**	4.354.011.384	619.628.706	14,23%)
Deposito berjangka Time deposits	**10.592.351.253**	15.997.222.547	(5.404.871.294)	(33,79%)
Total kas dan setara kas Total cash and cash equivalents	**15.567.392.704**	20.352.943.946	(4.785.551.242)	(23,51%)

INVESTASI JANGKA PENDEK
Investasi jangka pendek tahun 2025 mencapai Rp264,23 miliar, menurun 29,71% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai Rp375,94 miliar. Penurunan tersebut disebabkan pencairan dari penempatan deposito yang digunakan untuk kebutuhan operasional.

SHORT-TERM INVESTMENTS
Short-term investments in 2025 reached Rp264.23 billion, a 29.71% decrease compared to Rp375.94 billion in 2024. This decrease was due to withdrawals from time deposit placements used for operational needs.

Tabel Investasi Jangka Pendek
Short Term Investments

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Total deposito berjangka Total time deposits	**264.233.122**	375.940.000	(111.706.878)	(29,71%)
Efek yang diperdagangkan Marketable securities	**-**	2.057	(2.057)	(100,00%)
Total investasi jangka pendek Total short-term investments	**264.233.122**	375.942.057	(111.708.935)	(29,71%)

PIUTANG USAHA - NETO
Piutang usaha neto tahun 2025 mencapai Rp1,90 triliun, menurun 4,09% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai Rp2,01 triliun. Penurunan tersebut disebabkan oleh turunnya piutang usaha dari pihak ketiga sebesar Rp95,53 miliar.

TRADE RECEIVABLES – NET
Trade receivables - net in 2025 reached Rp1.90 trillion, a 4.09% decrease compared to Rp2.01 trillion in 2024. This decrease was due to a decrease in third-party receivables of Rp95.53 billion.

Tabel Piutang Usaha - Neto
Trade Receivables-Net

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pihak ketiga – neto Third parties - net	**1.461.815.335**	1.557.342.021	(95.526.686)	(6,13%)
Pihak berelasi – neto Related parties -net	**468.936.129**	455.819.901	13.116.228	2,88%
Piutang usaha – neto Trade receivables - net	**1.930.751.464**	2.013.161.922	(82.410.458)	(4,09%)

PIUTANG LAIN-LAIN - NETO
Piutang lain-lain neto tahun 2025 mencapai Rp206,26 miliar, meningkat 13,53% dibandingkan dengan tahun 2024 mencapai Rp181,68 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pertumbuhan piutang lain-lain dari pihak ketiga sebesar Rp29,85 miliar.

OTHER RECEIVABLES – NET
Other receivables - net in 2025 reached Rp206.26 billion, an increase of 13.53% compared to Rp181.68 billion in 2024. This increase was mainly due to an increase in other receivables from third parties of Rp29.85 billion.

Tabel Piutang Lain-Lain - Neto
Other Receivables - Net

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pihak ketiga – neto Third parties - net	**56.625.405**	26.776.429	29.848.976	111,47%
Pihak berelasi – neto Related parties -net	**149.634.818**	154.908.237	(5.273.419)	(3,40%)
Piutang lain-lain – neto Trade receivables - net	**206.260.223**	181.684.666	24.575.557	13,53%

UANG MUKA DAN BEBAN DIBAYAR DI MUKA
Uang muka dan beban dibayar di muka tahun 2025 mencapai Rp561,94 miliar, meningkat 35,76% dibandingkan dengan tahun 2024 mencapai Rp413,93 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan uang muka non operasional sebesar Rp232,47 miliar.

ADVANCES AND PREPAID EXPENSES
Advances and prepaid expenses in 2025 reached Rp561.94 billion, a 35.76% increase compared to Rp413.93 billion in 2024. This increase was mainly due to an increase in non-operational advance payments of Rp232.47 billion.

Tabel Uang Muka dan Beban Dibayar Di Muka
Advances And Prepaid Expenses

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Uang muka Advances				
Operasional Operational	**349.751.077**	117.284.878	232.466.199	198,21%
Lain-lain Others	**77.853.780**	142.801.455	(64.947.675)	(45,48%)
Subtotal	**427.604.857**	**260.086.333**	**167.518.524**	**64,41%**
Beban dibayar di muka Prepaid expenses				
Kerja sama mitra usaha Collaboration with business partners	**86.027.103**	93.368.319	(7.341.216)	(7,86%)
Sewa Leases	**11.503.960**	6.949.657	4.554.303	65,53%
Asuransi Insurance	**10.510.786**	24.848.453	(14.337.667)	(57,70%)
Umum General	**9.296.705**	5.013.972	4.282.733	85,42%
Pemeliharaan Maintenance	**7.871.548**	10.843.946	(2.972.398)	(27,41%)
Pegawai Employees	**6.137.287**	9.218.194	(3.080.907)	(33,42%)
Lain-lain Others	**2.988.760**	3.598.041	(609.281)	(16,93%)
Subtotal	**134.336.149**	**153.840.582**	**(19.504.433)**	**(12,68%)**
Total	**561.941.006**	**413.926.915**	**148.014.091**	**35,76%**

ASET KONTRAK

Aset kontrak tahun 2025 mencapai Rp237,50 miliar, menurun 14,97% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai Rp279,31 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh turunnya aset kontrak dari pihak ketiga sebesar Rp62,25 miliar.

CONTRACT ASSETS

Contract assets in 2025 reached Rp237.50 billion, a 14.97% decrease compared to Rp279.31 billion in 2024. This decrease was mainly due to a decrease in third-party contract assets of Rp62.25 billion.

Tabel Aset Kontrak
Contract Assets

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pihak ketiga – neto Third parties - net	**42.821.660**	105.072.119	(62.250.459)	(59,25%)

Tabel Aset Kontrak
Contract Assets

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pihak berelasi – neto Related parties -net	**194.673.861**	174.234.826	20.439.035	11,73%
Total	**237.495.521**	**279.306.945**	**(41.811.424)**	**(14,97%)**

PERSEDIAAN

Persediaan tahun 2025 mencapai Rp310,20 miliar, meningkat 11,59% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai Rp277,99 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan persediaan suku cadang sebesar Rp22,02 miliar.

INVENTORIES

Inventories in 2025 reached Rp310.20 billion, an 11.59% increase compared to Rp277.99 billion in 2024. This increase was mainly due to an increase in spareparts inventories of Rp22.02 billion.

Tabel Persediaan
Inventories

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Suku cadang Spareparts	**252.300.740**	230.277.604	22.023.136	9,56%
Bahan bakar Fuel	**67.706.761**	57.378.705	10.328.056	18,00%
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp500 juta) Others (each below Rp500 million)	**2.854.812**	3.052.688	(197.876)	(6,48%)
Total	**322.862.313**	**290.708.997**	**32.153.316**	**11,06%**
Dikurangi: Penyisihan persediaan usang Less: Allowance for inventory obsolence	**(12.661.767)**	(12.716.544)	54.777	(0,43%)
Neto Net	**310.200.546**	277.992.453	32.208.093	11,59%

PAJAK DIBAYAR DI MUKA

Pajak dibayar di muka tahun 2025 mencapai Rp815,70 miliar, meningkat 5,33% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai Rp774,44 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pertumbuhan pajak pertambahan nilai dari entitas anak sebesar Rp76,44 miliar.

PREPAID TAXES

Prepaid taxes in 2025 reached Rp815.70 billion, a 5.33% increase compared to Rp774.44 billion in 2024. This increase was mainly due to the increase in value-added tax from subsidiaries of Rp76.44 billion.

Tabel Pajak Dibayar Di Muka
Prepaid Taxes

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Perusahaan Company				
Pajak pertambahan nilai Value Added Tax	6.581	49.820	(43.239)	(86,79%)
Pajak penghasilan Income Tax	157.148.036	207.093.443	(49.945.407)	(24,12%)
Subtotal	**157.154.617**	**207.143.263**	**(49.988.646)**	**(24,13%)**
Entitas anak Subsidiaries				
Pajak pertambahan nilai Value Added Tax	559.028.883	482.587.068	76.441.815	15,84%
Pajak penghasilan lainnya Other Income Tax	99.505.973	84.712.941	14.793.032	17,46%
Subtotal	658.534.856	567.300.009	91.234.847	16,08%
Total	815.689.473	774.443.272	41.246.201	5,33%

ASET LANCAR LAINNYA

Aset lancar lainnya tahun 2025 mencapai Rp1,56 triliun, meningkat 15,87% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai Rp1,34 triliun. Peningkatan tersebut disebabkan pertumbuhan kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp160,56 miliar.

OTHER CURRENT ASSETS

Other current assets in 2025 reached Rp1.56 trillion, a 15.87% increase compared to Rp1.34 trillion in 2024. This increase was due to growth in restricted cash and cash equivalents of Rp160.56 billion.

Tabel Aset Lancar Lainnya
Other Current Assets

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya Restricted cash and cash equivalents	**1.432.184.038**	1.271.625.077	160.558.961	12,63%
Giro bank imbalan kerja Bank current account for employee benefits	**46.856.516**	48.986.341	(2.129.825)	(4,35%)
Lain-lain Other	**76.864.253**	22.200.003	54.664.250	246,24%
Total	**1.555.904.807**	**1.342.811.421**	**213.093.386**	**15,87%**

ASET TIDAK LANCAR

Aset tidak lancar tahun 2025 mencapai Rp104,60 triliun, meningkat 3,06% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai Rp101,50 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan aset aset kontrak konsesi sebesar Rp1,35 triliun.

NON-CURRENT ASSETS

Non-current assets in 2025 reached Rp104.60 trillion, a 3.06% increase compared to Rp101.50 trillion in 2024. This increase was mainly due to an increase in concession contract assets of Rp1.35 trillion.

Tabel Aset Tidak Lancar
Non-Current Assets

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Investasi jangka panjang Long term investments	**4.496.780.394**	5.012.419.887	(515.639.493)	(10,29%)
Properti investasi – neto Investment properties - net	**2.105.464.893**	1.323.604.656	781.860.237	59,07%
Aset tetap – neto Fixed assets - net	**42.263.350.916**	41.042.837.467	1.220.513.449	2,97%
Aset kerjasama operasi – neto Joint operation assets - net	**364.526.924**	368.258.512	(3.731.588)	(1,01%)
Aset hak guna - neto Right-of-use assets - net	**827.239.304**	786.222.536	41.016.768	5,22%
Aset pajak tangguhan Deferred tax assets	**2.239.828.188**	1.356.130.261	883.697.927	65,16%
Aset tak berwujud – neto Intangible assets - net	**42.897.155.187**	43.523.228.617	(626.073.430)	(1,44%)
Aset kontrak konsesi Concession contract assets	**6.635.265.469**	5.281.379.972	1.353.885.497	25,64%
Taksiran tagihan restitusi pajak Estimated claims for tax refund	**851.589.996**	1.142.420.387	(290.830.391)	(25,46%)
Aset tidak lancar lainnya Other non-current assets	**1.923.735.582**	1.659.019.867	264.715.715	15,96%
Total Aset Tidak Lancar Total non-current assets	**104.604.936.853**	101.495.522.162	3.109.414.691	3,06%

INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi jangka panjang tahun 2025 mencapai Rp4,50 triliun, menurun 10,29% dibandingkan dengan tahun 2024 mencapai Rp5,01 triliun. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh turunnya investasi pada entitas asosiasi sebesar Rp519,49 miliar.

LONG-TERM INVESTMENTS

Long-term investments in 2025 reached Rp4.50 trillion, a 10.29% decrease compared to Rp5.01 trillion in 2024. This decrease was mainly due to a decrease in investments in associated entities of Rp519.49 billion.

Tabel Investasi Jangka Panjang
Long-Term Investments

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Investasi pada entitas asosiasi Investments in associated entities	**3.530.134.445**	4.049.626.099	(519.491.654)	(12,83%)
Investasi pada penyertaan saham Investment in share of stock	**420.072.501**	371.206.549	48.865.952	13,16%
Investasi pada surat utang Investment in bonds	**546.573.448**	591.587.239	(45.013.791)	(7,61%)
Total	**4.496.780.394**	**5.012.419.887**	**(515.639.493)**	**(10,29%)**

PROPERTI INVESTASI - NETO

Properti investasi tahun 2025 mencapai Rp2,11 triliun, meningkat 59,07% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai Rp1,32 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pertumbuhan harga perolehan tanah sebesar Rp812,15 miliar.

INVESTMENT IN PROPERTY - NET

Investment property in 2025 reached Rp2.11 trillion, a 59.07% increase compared to Rp1.32 trillion in 2024. This increase was mainly due to an increase in land acquisition prices of Rp812.15 billion.

Tabel Properti Investasi
Investment in Property

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Harga perolehan Acquisition cost				
Tanah Land	1.707.374.217	895.222.152	812.152.065	90,72%
Bangunan fasilitas pelabuhan Port facilities	731.816.912	783.486.011	(51.669.099)	(6,59%)
Jalan dan Bangunan Roads and buildings	159.770.670	161.236.733	(1.466.063)	(0,91%)
Total	**2.598.961.799**	**1.839.944.896**	**759.016.903**	**41,25%**
Akumulasi penyusutan Accumulated depreciation				
Bangunan fasilitas pelabuhan Port facilities	(470.866.142)	(494.103.789)	23.237.647	(4,70%)
Jalan dan Bangunan Roads and buildings	(21.103.954)	(20.709.641)	(394.313)	1,90%
Total	**(491.970.096)**	**(514.813.430)**	**22.843.334**	**(4,44%)**
Dikurangi: Penyisihan penurunan nilai Less: Allowance for impairment	(1.526.810)	(1.526.810)	-	-

Tabel Properti Investasi
Investment in Property

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Nilai buku neto Net book value	2.105.464.893	1.323.604.656	781.860.237	59,07%

ASET TETAP - NETO

Aset tetap neto tahun 2025 mencapai Rp42,26 triliun, meningkat 2,97% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai Rp41,04 triliun. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan aset tetap pada harga perolehan bangunan fasilitas pelabuhan sebesar Rp678,16 miliar.

FIXED ASSETS - NET

Fixed assets - net in 2025 reached Rp42.26 trillion, a 2.97% increase compared to Rp41.04 trillion in 2024. This increase was due to an increase in fixed assets, particularly in the acquisition cost of port facility buildings, of Rp678.16 billion.

Tabel Aset Tetap
Fixed Assets

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Harga perolehan Acquisition cost				
Tanah Land	**3.516.239.048**	3.994.106.570	(477.867.522)	(11,96%)
Bangunan fasilitas pelabuhan Port facilities	**24.524.092.641**	23.845.930.120	678.162.521	2,84%
Kapal Vessels	**6.060.350.847**	5.974.190.015	86.160.832	1,44%
Alat fasilitas pelabuhan Port equipment	**17.512.697.954**	17.656.767.211	(144.069.257)	(0,82%)
Instalasi fasilitas pelabuhan Port installation	**3.916.363.140**	3.892.898.417	23.464.723	0,60%
Jalan dan bangunan Roads and buildings	**7.691.517.908**	7.061.378.962	630.138.946	8,92%
Peralatan Equipment	**1.772.350.048**	1.687.427.582	84.922.466	5,03%
Kendaraan Vehicles	**152.967.078**	186.826.743	(33.859.665)	(18,12%)
Emplasemen Emplacement	**924.588.062**	775.483.770	149.104.292	19,23%
Subtotal	**66.071.166.726**	65.075.009.390	996.157.336	1,53%
Aset dalam penyelesaian Construction in progress	**5.573.640.602**	3.221.414.379	2.352.226.223	73,02%
Total	**71.644.807.328**	**68.296.423.769**	**3.348.383.559**	**4,90%**
Akumulasi penyusutan Accumulated depreciation	**(29.159.735.591)**	(27.119.548.206)	(2.040.187.385)	7,52%

Tabel Aset Tetap
Fixed Assets

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Dikurangi: Penyisihan Penurunan Nilai Less: Allowance for impairment	(221.720.821)	(134.038.096)	(87.682.725)	65,42%
Nilai buku neto Net book value	42.263.350.916	41.042.837.467	1.220.513.449	2,97%

ASET KERJASAMA OPERASI - NETO

Aset kerjasama operasi - neto tahun 2025 mencapai Rp364,53 miliar, menurun 1,01% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai Rp368,26 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh turunnya aset kerjasama operasi pada harga perolehan tanah sebesar Rp4,96 triliun.

JOINT OPERATION ASSETS - NET

Joint operation assets - net in 2025 reached Rp364.53 billion, a 1.01% decrease compared to Rp368.26 billion in 2024. This decrease was mainly due to a decrease in acquisition costs of land of Rp4.96 trillion.

Tabel Aset Kerjasama Operasi
Joint Operation Assets

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Harga perolehan Acquisition Costs				
Tanah Land	-	4.960.306	(4.960.306)	(100,00%)
Bangunan fasilitas pelabuhan Port facilities	**800.418.612**	800.418.612	-	0,00%
Alat fasilitas pelabuhan Port equipment	**105.832.648**	93.046.361	12.786.287	13,74%
Instalasi fasilitas pelabuhan Port installation	**15.157.520**	10.504.447	4.653.073	44,30%
Jalan dan bangunan Roads and buildings	**1.971.499**	2.076.804	(105.305)	(5,07%)
Peralatan Equipment	**1.535.821**	1.535.821	-	0,00%
Emplasemen Emplacement	**4.530.520**	4.530.520	-	0,00%
Total	**929.446.620**	**917.072.871**	**12.373.749**	**1,35%**
Akumulasi penyusutan Accumulated depreciation	**(564.859.229)**	(548.753.892)	(16.105.337)	2,93%
Dikurangi: Penyisihan Penurunan Nilai Less: Allowance for impairment	**(60.467)**	(60.467)	-	-

Tabel Aset Kerjasama Operasi
Joint Operation Assets

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Nilai buku neto Net book value	364.526.924	368.258.512	(3.731.588)	(1,01%)

ASET HAK GUNA

Aset hak guna neto tahun 2025 mencapai Rp827,24 miliar, meningkat 79,40% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai Rp786,22 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan oleh pertumbuhan aset hak guna dari hak perolehan kendaraan sebesar Rp303,90 miliar.

RIGHT OF USE ASSETS

Right of use assets - net in 2025 reached Rp827.24 billion, a 79.40% increase compared to Rp786.22 billion in 2024. This increase was mainly due to vehicle acquisition costs of Rp303.90 billion.

Tabel Aset Hak Guna
Right-of-Use Assets

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Hak Perolehan Acquisition Costs				
Tanah Land	**281.393.347**	156.855.775	124.537.572	79,40%
Bangunan fasilitas pelabuhan Port facilities	**253.970.031**	289.809.431	(35.839.400)	(12,37%)
Kapal Vessels	**831.303.440**	648.129.563	183.173.877	28,26%
Alat fasilitas pelabuhan Port equipment	**1.840.743**	1.840.743	-	-
Peralatan Equipment	**11.002.531**	4.436.155	6.566.376	148,02%
Kendaraan Vehicles	**102.830.995**	77.364.597	303.904.823	25,79%
Subtotal	**1.482.341.087**	**1.178.436.264**	**(262.888.055)**	**67,03%**
Akumulasi penyusutan Accumulated depreciation	**(655.101.783)**	(392.213.728)	41.016.768	5,22%
Nilai buku bersih Net book value	**827.239.304**	786.222.536	124.537.572	79,40%

ASET PAJAK TANGGUHAN

Aset pajak tangguhan tahun 2025 mencapai Rp2,24 triliun, meningkat 65,16% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai Rp1,36 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan oleh pertumbuhan aset pajak tangguhan pada perusahaan sebesar Rp683,78 miliar.

DEFERRED TAX ASSETS

Deferred tax assets in 2025 reached Rp2.24 trillion, a 65.16% increase compared to Rp1.36 billion in 2024. This increase was mainly due to an increase in deferred tax assets of Rp683.78 billion.

Tabel Aset Pajak Tangguhan
Deferred Tax Assets

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Perusahaan Company	**1.174.377.872**	490.594.872	683.783.000	139,38%
Entitas anak Subsidiaries	**1.065.450.316**	865.535.389	199.914.927	23,10%
Aset Pajak Tangguhan Deferred tax assets	**2.239.828.188**	1.356.130.261	883.697.927	65,16%

ASET TAKBERWUJUD - NETO

Aset takberwujud tahun 2025 mencapai Rp42,90 triliun, menurun 1,44% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai Rp43,52 triliun. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh turunnya aset hak konsesi sebesar Rp551,46 miliar.

INTANGIBLE ASSETS - NET

Intangible assets – net in 2025 reached Rp42.90 trillion, a 1.44% decrease compared to Rp43.52 trillion in 2024. This decrease was mainly due to a decrease in concession rights assets of Rp551.46 billion.

Tabel Aset TakBerwujud
Intangible Assets

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Aset hak konsesi Concession rights assets	**42.287.285.152**	42.838.745.882	(551.460.730)	(1,29%)
Aset tak berwujud lainnya Other intangible assets	**609.870.035**	684.482.735	(74.612.700)	(10,90%)
Neto Net	**42.897.155.187**	43.523.228.617	(626.073.430)	(1,44%)

ASET KONTRAK KONSESI

Aset kontrak konsesi lancar 2025 mencapai Rp6,64 triliun, meningkat 25,64% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai Rp5,28 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan aset dalam penyelesaian-hak konsesi Rp1,35 triliun.

CONCESSION CONTRACT ASSETS

Current concession contract assets in 2025 reached Rp6.64 trillion, a 25.64% increase compared to Rp5.28 trillion in 2024. This increase was mainly due to an increase in assets in progress — contract assets of Rp1.35 trillion.

Tabel Aset Kontrak Konsensi
Concession Contract Assets

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Aset dalam penyelesaian - hak konsesi Assets in progress - contract assets	6.635.265.469	5.281.379.972	1.353.885.497	25,64%

TAKSIRAN TAGIHAN RESTITUSI PAJAK

Taksiran tagihan restitusi pajak tahun 2025 mencapai Rp851,59 miliar, menurun 25,46% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai Rp1,14 triliun. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh turunnya taksiran tagihan restitusi pajak di Perusahaan sebesar Rp315,05 miliar.

ESTIMATED CLAIMS FOR TAX REFUNDS

The estimated claims for tax refunds for 2025 reached Rp851.59 billion, a 25.46% decrease compared to Rp1.14 trillion in 2024. This decrease is mainly due to a decrease in the Company estimated claims for tax refunds of Rp315.05 billion.

Tabel Taksiran Tagihan Restitusi Pajak
Estimated Claims for Tax Refund

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Perusahaan Company	**409.884.710**	724.931.449	(315.046.739)	(43,46%)
Entitas anak Subsidiaries	**441.705.286**	417.488.938	24.216.348	5,80%
Total	**851.589.996**	**1.142.420.387**	**(290.830.391)**	**(25,46%)**

ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

Aset tidak lancar lainnya tahun 2025 mencapai Rp1,92 triliun, menurun 4,99% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai Rp1,66 triliun. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh turunnya piutang pemulihan investasi sebesar Rp205,84 miliar.

OTHER NON-CURRENT ASSETS

Other non-current assets reached Rp1.92 trillion in 2025, a 4.99% decrease compared to Rp1.66 trillion in 2024. This decrease was mainly due to a decrease in receivables investment recovery of Rp205.84 billion.

Tabel Aset Tidak Lancar Lainnya
Other Non-Current Assets

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Piutang sewa pembiayaan Finance lease receivables	**459.456.715**	488.197.547	(28.740.832)	(5,89%)
Uang muka pembelian aset tetap Advances for purchase of fixed assets	**369.184.128**	48.901.805	320.282.323	654,95%
Piutang atas rental QSR Receivables for rental of QSR	**290.578.552**	152.197.957	138.380.595	90,92%
Piutang pemulihan investasi Receivables investment recovery	**181.476.422**	387.316.662	(205.840.240)	(53,15%)
Pajak final dibayar di muka Prepaid final tax	**196.980.231**	207.321.274	(10.341.043)	(4,99%)
Goodwill	**31.407.483**	31.407.483	240.263.245	16,39%
Aset lain-lain Other assets	**176.968.601**	150.446.159	264.715.715	15,96%
Subtotal	**1.706.052.132**	**1.465.788.887**	**(28.740.832)**	**(5,89%)**

Tabel Aset Tidak Lancar Lainnya
Other Non-Current Assets

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Beban tangguhan Deferred expense	**535.002.791**	434.124.457	320.282.323	654,95%
Dikurangi: Akumulasi amortisasi beban tangguhan Accumulated amortization of deferred expense	**(317.319.341)**	(240.893.477)	138.380.595	90,92%
Subtotal	**217.683.450**	**193.230.980**	**(205.840.240)**	**(53,15%)**
Total	**1.923.735.582**	**1.659.019.867**	**(10.341.043)**	**(4,99%)**

TOTAL LIABILITAS

Total liabilitas tahun 2025 mencapai Rp75,70 triliun, menurun 2,10% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai Rp77,32 triliun. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh turunnya liabilitas jangka pendek sebesar Rp12,31 triliun.

TOTAL LIABILITIES

Total liabilities in 2025 reached Rp75.70 trillion, a 2.10% decrease compared to Rp77.32 trillion in 2024. This decrease was mainly due to a decrease in current liabilities of Rp12.31 trillion.

Tabel Liabilitas
Liabilities

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Liabilitas jangka pendek Current Liabilities	**18.891.313.053**	31.198.794.966	(12.307.481.913)	(39,45%)
Liabilitas jangka panjang Non-Current liabilities	**56.805.888.900**	46.122.088.044	10.683.800.856	23,16%
Total liabilitas Total Liabilities	**75.697.201.953**	77.320.883.010	(1.623.681.057)	(2,10%)

LIABILITAS JANGKA PENDEK

Liabilitas jangka pendek tahun 2025 mencapai Rp18,89 triliun, menurun 39,45% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai Rp31,20 triliun. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh turunnya bagian lancar atas utang obligasi yang sebesar Rp18,40 triliun.

CURRENT LIABILITIES

Current liabilities in 2025 reached Rp18.89 trillion, a 39.45% decrease compared to Rp31.20 trillion in 2024. This decrease was mainly due to a decrease in the current trade payables of Rp18.40 trillion.

Tabel Liabilitas Jangka Pendek
Current Liabilities

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	**2025**	**2024**	**Pertumbuhan** Growth	
			(Rp)	**(%)**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4) = (2)-(3)**	**(5) = (4)/(3)**
Utang usaha Trade payables				
Pihak ketiga Third parties	**803.956.602**	766.047.682	37.908.920	4,95%
Pihak berelasi Related parties	**128.326.253**	96.565.849	31.760.404	32,89%
Liabilitas kontrak jangka pendek Short-term contract liabilities	**1.685.524.258**	1.659.298.580	26.225.678	1,58%
Utang pajak Taxes payable	**580.175.753**	500.490.093	79.685.660	15,92%
Beban akrual Accrued expenses	**9.414.369.377**	6.666.411.251	2.747.958.126	41,22%
Bagian lancar atas: Current maturities of:				
Utang obligasi Bonds payable	**49.988.389**	18.446.568.351	(18.396.579.962)	(99,73%)
Utang bank jangka panjang Long-term bank loans	**4.294.440.048**	1.068.675.471	3.225.764.577	301,85%
Liabilitas sewa Lease liabilities	**363.576.600**	134.702.846	228.873.754	169,91%
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek Short-term employee benefit liabilities	**429.519.134**	463.764.537	(34.245.403)	(7,38%)
Liabilitas jangka pendek lainnya Other current liabilities				
Pihak ketiga Third parties	**755.771.691**	517.102.900	238.668.791	46,15%
Pihak berelasi Related parties	**385.664.948**	879.167.406	(493.502.458)	(56,13%)
Total Liabilitas Jangka Pendek Total Current Liabilities	**18.891.313.053**	**31.198.794.966**	**(12.307.481.913)**	**(39,45%)**

UTANG USAHA

Utang usaha tahun 2025 mencapai Rp932,28 miliar, meningkat 8,08% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai Rp862,61 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pertumbuhan utang usaha kepada pihak ketiga sebesar Rp37,91 miliar.

TRADE PAYABLES

Trade payables in 2025 reached Rp932.28 billion, an 8.08% increase compared to Rp862.61 billion in 2024. This increase was mainly due to growth in trade payables with third parties of Rp37.91 billion.

Tabel Utang Usaha
Trade Payables

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pihak ketiga Third parties	**803.956.602**	766.047.682	37.908.920	4,95%
Pihak berelasi Related parties	**128.326.253**	96.565.849	31.760.404	32,89%
Total utang usaha Total trade payables	**932.282.855**	862.613.531	69.669.324	8,08%

LIABILITAS KONTRAK JANGKA PENDEK

Liabilitas kontrak jangka pendek tahun 2025 mencapai Rp1,69 triliun, meningkat 1,58% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai Rp1,66 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pertumbuhan bagian lancar liabilitas kontrak jangka panjang sebesar Rp182,12 miliar.

CURRENT CONTRACT LIABILITIES

Current contract liabilities in 2025 reached Rp1.69 trillion, a 1.58% increase compared to Rp1.66 trillion in 2024. This increase was mainly due to growth in the current portion of long-term contract liabilities of Rp182.12 billion.

Tabel Liabilitas Kontrak Jangka Pendek
Current Contract Liabilities

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Sewa kuartalan Quarterly rent	**765.618.473**	731.219.513	34.398.960	4,70%
Uang pelanggan Advances from customers				
Pihak ketiga Third parties	**287.142.379**	334.791.545	(47.649.166)	(14,23%)
Pihak berelasi Related parties	**52.835.677**	72.362.148	(19.526.471)	(26,98%)
Pelayanan jasa pengusahaan tanah, bangunan, air dan listrik Land, building, water and electricity services	**37.612.757**	156.779.059	(119.166.302)	(76,01%)
Liabilitas kontrak jangka pendek – lainnya Other short-term contract liabilities	**14.148.586**	18.096.593	(3.948.007)	(21,82%)
Subtotal	**1.157.357.872**	1.313.248.858	(155.890.986)	(11,87%)
Bagian lancar liabilitas kontrak jangka panjang Current portion of long-term contract liabilities	**528.166.386**	346.049.722	182.116.664	52,63%
Total	**1.685.524.258**	**1.659.298.580**	**26.225.678**	**1,58%**

UTANG PAJAK

Utang pajak tahun 2025 mencapai Rp580,18 miliar, meningkat 15,92% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai Rp500,49 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pertumbuhan utang pajak pada entitas anak sebesar Rp42,71 miliar.

TAXES PAYABLE

Taxes payable in 2025 reached Rp580.18 billion, a 15.92% increase compared to Rp500.49 billion in 2024. This increase was mainly due to the increase in taxes payable in subsidiaries of Rp42.71 billion.

Tabel Utang Pajak
Taxes Payable

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Induk perusahaan Company	**160.275.120**	123.295.949	36.979.171	29,99%
Entitas anak Subsidiaries	**419.900.633**	377.194.144	42.706.489	11,32%
Utang pajak Taxes payable	**580.175.753**	500.490.093	79.685.660	15,92%

BEBAN AKRUAL

Beban akrual tahun 2025 mencapai Rp9,41 triliun, meningkat 41,22% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai Rp6,67 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pertumbuhan beban akrual dari kontraktor sebesar Rp1,38 triliun.

ACCRUED EXPENSES

Accrued expenses in 2025 reached Rp9.41 trillion, a 41.22% increase compared to Rp6.67 trillion in 2024. This increase was mainly due to growth in accrued expenses from contractors of Rp1.38 trillion.

Tabel Beban Akrual
Accrued Expenses

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pegawai Employees	**2.777.007.446**	1.779.465.617	997.541.829	56,06%
Kontraktor Contractors	**2.029.141.139**	644.257.800	1.384.883.339	214,96%
Kerjasama mitra usaha Partnership	**1.514.490.949**	1.439.857.145	74.633.804	5,18%
Bahan Material	**826.376.272**	484.539.500	341.836.772	70,55%
Umum General	**796.139.531**	756.502.810	39.636.721	5,24%
Pemeliharaan Maintenance	**486.649.385**	528.558.112	(41.908.727)	(7,93%)
Bunga Interest	**130.354.682**	212.707.529	(82.352.847)	(38,72%)
Biaya konsesi Concession fee	**70.584.720**	76.664.904	(6.080.184)	(7,93%)

Tabel Beban Akrual
Accrued Expenses

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Asuransi Insurance	**67.769.619**	45.128.387	22.641.232	50,17%
Lain-lain Others	**715.855.634**	698.729.447	17.126.187	2,45%
Total	**9.414.369.377**	**6.666.411.251**	**2.747.958.126**	**41,22%**

BAGIAN LANCAR

Bagian lancar atas liabilitas jangka pendek tahun 2025 mencapai Rp4,71 triliun, menurun 76,04% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai Rp19,65 triliun. Penurunan tersebut terutama disebabkan turunnya bagian lancar atas liabilitas jangka pendek pada utang obligasi sebesar Rp18,40 triliun.

CURRENT PORTION

The current portion of short-term liabilities in 2025 reached Rp4.71 trillion, a 76.04% decrease compared to Rp19.65 trillion in 2024. This decrease was mainly due to a decrease in the current portion of short-term liabilities in bonds payable of Rp18.40 trillion.

Tabel Bagian Lancar atas Liabilitas Jangka Pendek
Current Portion of Long-Term Liabilities

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Utang obligasi Bonds payable	**49.988.389**	18.446.568.351	(18.396.579.962)	(99,73%)
Utang bank jangka panjang Bank loans	**4.294.440.048**	1.068.675.471	3.225.764.577	301,85%
Liabilitas sewa Lease liabilities	**363.576.600**	134.702.846	228.873.754	169,91%
Bagian lancar atas liabilitas jangka panjang Total Current Maturities of Long-Term Liabilities	**4.708.005.037**	19.649.946.668	(14.941.941.631)	(76,04%)

LIABILITAS KERJA JANGKA PENDEK LAINNYA

Liabilitas kerja jangka pendek lainnya tahun 2025 mencapai Rp1,14 triliun, menurun 18,25% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai Rp1,40 triliun. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh turunnya liabilitas kerja jangka pendek lainnya pada pihak berelasi sebesar Rp493,51 miliar.

OTHER CURRENT LIABILITIES

Other current liabilities in 2025 reached Rp1.14 trillion, an 18.25% decrease compared to Rp1.40 trillion in 2024. This decrease was mainly due to a decrease in other current liabilities with related parties of Rp493.51 billion.

Tabel Liabilitas Kerja Jangka Pendek Lainnya
Other Current Liabilities

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pihak ketiga Third parties	**755.771.691**	517.102.900	238.668.791	46,15%
Pihak berelasi Related parties	**385.664.948**	879.167.406	(493.502.458)	(56,13%)
Liabilitas kerja jangka pendek lainnya Other current liabilities	**1.141.436.639**	1.396.270.306	(254.833.667)	(18,25%)

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Liabilitas jangka panjang tahun 2025 mencapai Rp56,81 triliun, meningkat 23,16% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai Rp46,12 triliun. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pertumbuhan utang bank sebesar Rp10,65 triliun.

NON-CURRENT LIABILITIES

Non-Current liabilities in 2025 reached Rp56.81 trillion, a 23.16% increase compared to Rp46.12 trillion in 2024. This increase was mainly due to growth in bank loans of Rp10.65 trillion

Tabel Liabilitas Jangka Panjang
Non-Current Liabilities

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Utang obligasi Bonds payable	**8.487.957.191**	8.249.264.237	238.692.954	2,89%
Utang bank Long-term bank loans	**34.095.339.441**	23.447.068.879	10.648.270.562	45,41%
Liabilitas sewa Lease liabilities	**442.519.425**	775.556.684	(333.037.259)	(42,94%)
Utang lembaga keuangan non bank Loan from non-bank financial institution				
Pihak ketiga Third parties	**-**	763.941.899	(763.941.899)	(100,00%)
Pihak berelasi Related parties	**-**	1.502.045.095	(1.502.045.095)	(100,00%)
Liabilitas pajak tangguhan Deferred tax liabilities	**84.857.757**	91.699.230	(6.841.473)	(7,46%)
Liabilitas kontrak jangka panjang Long-term contract liabilities	**5.069.291.460**	5.164.017.893	(94.726.433)	(1,83%)
Liabilitas jangka panjang lainnya Other long-term liabilities	**955.431.661**	820.081.368	135.350.293	16,50%
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang Long-term employee benefit liabilities	**7.670.491.965**	5.308.412.758	2.362.079.207	44,50%
Total Liabilitas Jangka Panjang Total Non-current Liabilities	**56.805.888.900**	46.122.088.044	10.683.800.856	23,16%

UTANG OBLIGASI

Utang obligasi tahun 2025 mencapai Rp8,49 triliun, meningkat 2,89% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai Rp8,25 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya utang obligasi dari Senior Notes Penerbitan Tahun 2015 sebesar Rp7,69 triliun.

BONDS PAYABLE

Bonds payable in 2025 reached Rp8.49 trillion, a 2.89% increase compared to Rp8.25 trillion in 2024. This increase was mainly due to Rp7.69 trillion in bonds payable from Senior Notes Issued in 2015.

Tabel Utang Obligasi
Bonds Payable

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Senior Notes Penerbitan Tahun 2015 Senior Notes Issued in 2015	**7.688.182.434**	-	7.688.182.434	100,00%
Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 Seri C Pelindo IV 2018 Series C Bonds	**799.774.757**	-	799.774.757	100,00%
Senior Notes Penerbitan Tahun 2015 Senior Notes Issued in 2015	**-**	7.399.855.040	(7.399.855.040)	(100,00%)
Obligasi I Pelindo I Gerbang Nusantara Tahun 2016 Seri D Pelindo I Gerbang Nusantara Bond 2016 Series D	**-**	49.965.166	(49.965.166)	(100,00%)
Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 Seri C Pelindo IV 2018 Series C Bonds	**-**	799.444.031	(799.444.031)	(100,00%)
Utang obligasi Bonds payable	**8.487.957.191**	8.249.264.237	238.692.954	2,89%

UTANG BANK

Utang bank tahun 2025 mencapai Rp34,10 triliun, meningkat 45,41% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai Rp23,45 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pertumbuhan utang bank jangka panjang sebesar Rp13,87 triliun.

BANK DEBT

Bank debt in 2025 reached Rp34.10 trillion, a 45.41% increase compared to Rp23.45 trillion in 2024. This increase was mainly due to growth in long-term bank loans of Rp13.87 trillion.

Tabel Utang Bank
Bank Loans

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Utang bank jangka panjang Long-term bank loans	**38.389.779.489**	24.515.744.350	13.874.035.139	56,59%
Bagian lancar Current portion	**(4.294.440.048)**	(1.068.675.471)	(3.225.764.577)	301,85%
Utang bank jangka panjang, setelah dikurangi bagian lancar Long-term bank loans, net of current portion	**34.095.339.441**	23.447.068.879	10.648.270.562	45,41%

LIABILITAS SEWA

Liabilitas sewa tahun 2025 mencapai Rp442,52 miliar, menurun 42,94% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai Rp775,56 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh berkurangnya liabilitas sewa sebagai dampak dari realisasi pembayaran liabilitas sewa yang telah dilakukan pada tahun 2025.

LEASE LIABILITIES

Lease liabilities in 2025 reached Rp442.52 billion, a decrease of 42.94% compared to Rp775.56 billion in 2024. The decrease was primarily due to a reduction in lease liabilities resulting from the settlement of lease liabilities in 2025.

Tabel Liabilitas Sewa
Lease Liabilities

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Liabilitas sewa Lease liabilities	442.519.425	775.556.684	(333.037.259)	(42,94%)

UTANG LEMBAGA KEUANGAN NON BANK

Pada tahun 2025 tidak terdapat utang lembaga keuangan non bank, menurun 100,00% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai Rp2,27 triliun. Penurunan tersebut disebabkan telah dilakukan pelunasan pinjaman di entitas group perusahaan melalui *refinancing* pinjaman bilateral Bank Mandiri.

LOANS FROM NON-BANK FINANCIAL INSTITUTIONS

In 2025 there were no loans from non-bank financial institutions, a decrease of 100.00% compared to Rp2.27 trillion in 2024. The decrease was due to the repayment of loans at the group's entities through the refinancing of bilateral loans from Bank Mandiri.

Tabel Utang Lembaga Keuangan Non Bank
Non-Bank Financial Institution Liabilities

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pihak ketiga Third parties	-	763.941.899	(763.941.899)	(100,00%)
Pihak berelasi Related parties	-	1.502.045.095	(1.502.045.095)	(100,00%)
Total utang lembaga keuangan non bank Total Non-Bank Financial Institution Liabilities	-	2.265.986.994	(2.265.986.994	(100,00%)

LIABILITAS PAJAK TANGGUHAN

Liabilitas pajak tangguhan tahun 2025 mencapai Rp84,89 miliar, menurun 7,46% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai Rp91,70 miliar. Hal ini dipengaruhi oleh pembalikan perbedaan temporer yang terjadi sepanjang tahun berjalan, seiring dengan penyesuaian fiskal atas transaksi dan akun-akun terkait.

DEFERRED TAX LIABILITIES

Deferred tax liabilities in 2025 reached Rp84.89 billion, a decrease of 7.46% compared to Rp91.70 billion in 2024. This was influenced by the reversal of temporary differences that occurred during the current year, along with fiscal adjustments to related transactions and accounts.

Tabel Liabilitas Pajak Tangguhan
Deferred Tax Liabilities

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Liabilitas pajak tangguhan Deferred tax liabilities	**84.857.757**	91.699.230	(6.841.473)	(7,46%)

LIABILITAS KONTRAK JANGKA PANJANG

Liabilitas kontrak jangka panjang tahun 2025 mencapai Rp5,07 triliun, menurun 1,83% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai Rp5,16 triliun. Penurunan tersebut antara lain disebabkan oleh turunnya liabilitas kontrak jangka panjang dari sewa diterima di muka - NPCT 1 sebesar Rp62,37 miliar.

LONG TERM CONTRACT LIABILITIES

Long-term contract liabilities in 2025 reached Rp5.07 trillion, a decrease of 1.83% compared to Rp5.16 trillion in 2024. This decrease was mainly due a decrease in Advance rental fee - NPCT1 of Rp62.37 billion.

Tabel Liabilitas Kontrak Jangka Panjang
Long-Term Contract Liabilities

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Sewa tanah dan/atau bangunan Land and/or building rental	**2.522.384.030**	2.372.621.819	149.762.211	6,31%
Premium JICT JICT Premium	**1.713.193.638**	1.713.193.638	-	0,00%
Sewa diterima di muka - NPCT 1 Advance rental fee - NPCT1	**987.452.053**	1.049.824.033	(62.371.980)	(5,94%)
Premium TPK Koja TPK Koja Premium	**374.428.125**	374.428.125	-	-
Subtotal	**5.597.457.846**	5.510.067.615	87.390.231	1,59%
Bagian lancar Current portion	**(528.166.386)**	(346.049.722)	(182.116.664)	52,63%
Total bagian jangka panjang Total long-term portion	**5.069.291.460**	5.164.017.893	(94.726.433)	(1,83%)

LIABILITAS JANGKA PANJANG LAINNYA

Liabilitas jangka panjang lainnya tahun 2025 mencapai Rp955,43 miliar, meningkat 16,50% dibandingkan dengan tahun tahun 2024 yang mencapai Rp820,08 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pertumbuhan liabilitas jangka panjang lainnya dari pihak

OTHER LONG TERM LIABILITIES

Other long-term liabilities in 2025 reached Rp55.43 billion, an increase of 16.50% compared to Rp820.08 billion in 2024. This increase was mainly due to the growth of Rp154.05 billion in other long-term liabilities from third parties.

ketiga sebesar Rp154,05 miliar.

Tabel Liabilitas Jangka Panjang Lainnya
Other Long-Term Liabilities

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pihak ketiga Third parties	**955.407.696**	801.359.341	154.048.355	19,22%
Pihak berelasi Related parties	**23.965**	18.722.028	(18.698.063)	(99,87%)
Liabilitas jangka panjang lainnya Other Long-Term Liabilities	**955.431.661**	820.081.369	135.350.292	16,50%

LIABILITAS IMBALAN KERJA

Liabilitas imbalan kerja tahun 2025 mencapai Rp7,67 triliun, meningkat 44,50% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai Rp5,31 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pertumbuhan program kesehatan pensiunan sebesar Rp1,83 triliun.

EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES

Employee benefits liabilities in 2025 reached Rp7.67 trillion, an increase of 44.50% compared to Rp5.31 trillion 2024. This increase was mainly due to growth in the Pension healthcare program of Rp1.83 trillion.

Tabel Liabilitas Imbalan Kerja
Employee Benefits Liabilities

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Perusahaan Company				
Program pensiun Pension program	**98.614.515**	-	98.614.515	100,00%
Program penghargaan masa bhakti Gratuity and compensation benefits	**2.774.681.009**	2.345.278.696	429.402.313	18,31%
Program kesehatan pensiunan Pension healthcare program	**4.621.252.200**	2.789.538.919	1.831.713.281	65,66%
Imbalan kerja jangka panjang lainnya Other long-term employee benefits	**102.457.748**	118.464.917	(16.007.169)	(13,51%)
Subtotal	**7.597.005.472**	5.253.282.532	2.343.722.940	44,61%
Entitas anak Subsidiaries				
Program pensiun, penghargaan masa bhakti dan imbalan pasca-kerja lainnya Pension program, gratuity and compensation benefits and other post-benefits program	**503.005.627**	518.894.763	(15.889.136)	(3,06%)
Total	**8.100.011.099**	5.772.177.295	2.327.833.804	40,33%
Dikurangi: bagian jangka pendek Less: short-term portion	**(429.519.134)**	(463.764.537)	34.245.403	(7,38%)
Total	**7.670.491.965**	5.308.412.758	2.362.079.207	44,50%

EKUITAS

Ekuitas neto tahun 2025 mencapai Rp50,19 triliun, meningkat 0,34% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai Rp50,36 triliun. Peningkatan tersebut karena pertumbuhan saldo laba yang ditentukan penggunaannya sebesar Rp1,88 triliun.

EQUITY

Net equity in 2025 reached Rp50.19 trillion, an increase of 0.34% compared to Rp50.36 trillion in 2024. This increase was due to growth in appropriated retained earnings of Rp1.88 trillion.

Tabel Ekuitas
Equity

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Equity attributable to owners of the parent entity				
Modal saham Share capital	**40.575.584.000**	40.575.584.000	-	-
Modal donasi Donated capital	**26.825.982**	26.825.982	-	-
Tambahan modal disetor Additional paid-in capital	**(33.358.048.450)**	(33.358.048.450)	-	-
Komponen ekuitas lainnya Other equity component	**1.466.121**	1.466.121	-	-
Selisih nilai transaksi dengan pihak non pengendali Difference in value of transactions with non-controling interest	**836.905.071**	836.905.071	-	-
Saldo Laba Retained earnings				
Ditentukan penggunaannya Appropriated	**38.962.857.822**	37.079.792.756	1.883.065.066	5,08%
Belum ditentukan penggunaannya Unappropriated	**5.304.105.426**	4.726.606.443	577.498.983	12,22%
Penghasilan Komprehensif Lain Other comprehensive income	**(3.457.292.320)**	(1.792.048.331)	(1.665.243.989)	92,92%
Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk – Neto Equity attributable to owners of the parent entity - Net	**48.892.403.652**	48.097.083.592	795.320.060	1,65%
Kepentingan Non-pengendali Non-controlling interests	**1.465.200.114**	2.089.769.157	(624.569.043)	(29,89%)
EKUITAS – NETO EQUITY - NET	**50.357.603.766**	50.186.852.749	170.751.017	0,34%

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN ? GROUP AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN

CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

Tabel Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian (dalam ribuan Rupiah)
Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income (in thousand Rupiah)

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pendapatan operasi Operating revenues	**36.728.274.052**	34.833.868.458	1.894.405.594	5,44%
Beban operasi Operating expenses	**(28.588.823.619)**	(28.382.501.274)	(206.322.345)	0,73%
Beban operasi lainnya – neto Other operating expenses - net	**(680.943.444)**	(190.608.606)	(490.334.838)	257,25%
LABA OPERASI INCOME FROM OPERATIONS	**7.458.506.989**	6.286.758.578	1.171.748.411	18,64%
Pendapatan keuangan Finance income	**900.264.463**	838.881.229	61.383.234	7,32%
Beban keuangan Finance costs	**(2.966.736.560)**	(3.004.687.722)	37.951.162	(1,26%)
Bagian laba entitas asosiasi Equity in income of associates	**433.063.192**	540.555.119	(107.491.927)	(19,89%)
LABA SEBELUM PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN BADAN INCOME BEFORE FINAL TAX AND CORPORATE INCOME TAX	**5.825.098.084**	4.661.507.204	1.163.590.880	24,96%
Beban pajak final Final tax expense	**(730.626.924)**	(680.063.269)	(50.563.655)	7,44%
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BADAN INCOME BEFORE CORPORATE INCOME TAX	**5.094.471.160**	3.981.443.935	1.113.027.225	27,96%
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN BADAN CORPORATE INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)				
Kini Current	**(1.144.790.711)**	(886.121.839)	(258.668.872)	29,19%
Tangguhan Deferred	**413.625.324**	707.815.249	(294.189.925)	(41,56%)
LABA TAHUN BERJALAN INCOME FOR THE YEAR	**4.363.305.773**	3.803.137.345	560.168.428	14,73%

Tabel Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian (dalam ribuan Rupiah)

Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income (in thousand Rupiah)

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN OTHER COMPREHENSIVE INCOME				
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi Item that will not be reclassified to profit or loss				
Pengukuran kembali program imbalan pasti - neto setelah pajak Remeasurements of defined benefit plans - net off	**(1.690.586.691)**	763.117.936	(2.453.704.627)	(321,54%)
Perubahan nilai wajar aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain Change in fair value of financial assets at fair value through other comprehensive income	**215.991.882**	(173.841.358)	389.833.240	(224,25%)
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi Item that will be reclassified to profit or loss				
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan Exchange differences due to financial statements translation	**(6.614.063)**	102.980.463	(109.594.526)	(106,42%)
Bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas Effective portion of gains and losses on hedging instrument in relation to cash flow hedge	**(184.035.117)**	(111.286.795)	(72.748.322)	65,37%
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR	**2.698.061.784**	4.384.107.591	(1.686.045.807)	(38,46%)
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA: INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:				
Pemilik entitas induk Owners of the parent entity	**4.161.329.930**	3.583.830.947	577.498.983	16,11%
Kepentingan non pengendali Non-controlling interests	**201.975.843**	219.306.398	(17.330.555)	(7,90%)
LABA TAHUN BERJALAN INCOME FOR THE YEAR	**4.363.305.773**	3.803.137.345	560.168.428	14,73%
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA: TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:				

Tabel Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian (dalam ribuan Rupiah)
Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income (in thousand Rupiah)

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pemilik entitas induk Owners of the parent entity	**2.496.603.203**	4.164.801.193	(1.668.197.990)	(40,05%)
Kepentingan non pengendali Non-controlling interests	**201.458.581**	219.306.398	(17.847.817)	(8,14%)
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN TOTAL COMPREHENSIVEINCOME FOR THE YEAR	**2.698.061.784**	4.384.107.591	(1.686.045.807)	(38,46%)
LABA PER SAHAM DASAR (nilai penuh) BASIC EARNINGS PER SHARE (full amount)	**102.557**	88.325	14.232	16,11%
LABA PER SAHAM DILUSIAN (nilai penuh) DILUTED EARNINGS PER SHARE (full amount)	**101.242**	87.192	14.050	16,11%

Grafik Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian (dalam triliun Rupiah)
Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income (in trillion Rupiah)

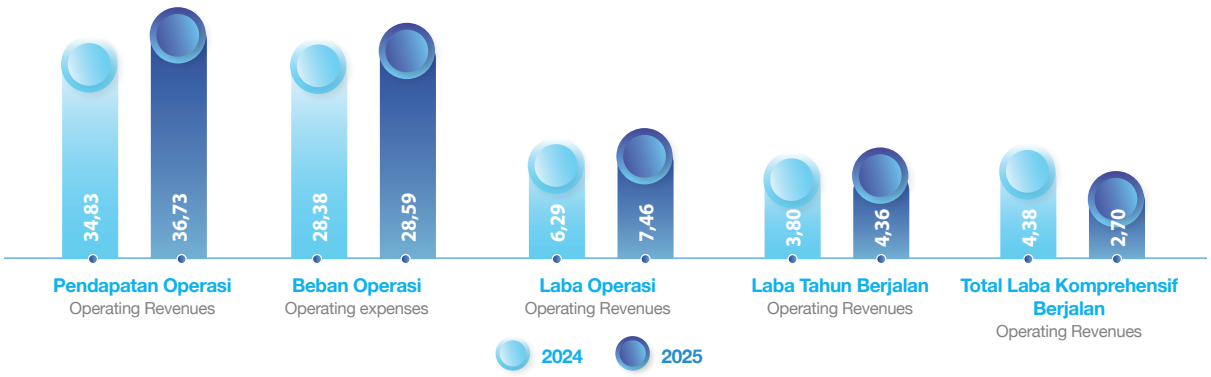

PENDAPATAN OPERASI

Pendapatan operasi tahun 2025 mencapai Rp36,73 triliun, meningkat 5,44% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai Rp34,83 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan kenaikan pendapatan operasi yang berasal dari pelayanan terminal petikemas sebesar Rp1,15 triliun.

INCOME FROM OPERATIONS

Income from operations in 2025 reached Rp36.73 trillion, an increase of 5.44% compared to Rp34.83 trillion in 2024. This increase was mainly due to an increase in container services of Rp1.15 trillion.

Tabel Pendapatan Operasi
Income from Operations

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pelayanan terminal petikemas Container services	**14.338.248.507**	13.190.291.096	1.147.957.411	8,70%
Pelayanan jasa kapal Vessel services	**7.064.995.990**	6.385.301.595	679.694.395	10,64%
Pengusahaan tanah, bangunan, air dan listrik Land, building, water and electricity services	**5.187.758.180**	4.889.803.829	297.954.351	6,09%
Pendapatan barang non-petikemas Non-container services	**4.896.916.069**	4.823.004.590	73.911.479	1,53%
Kerjasama dan fee for services Partnership and fee for services	**1.208.780.372**	965.616.264	243.164.108	25,18%
Pendapatan konsolidasi dan distribusi barang Goods consolidation and distribution services	**693.699.099**	561.816.501	131.882.598	23,47%
Pengusahaan peralatan Equipment services	**653.079.229**	434.671.387	218.407.842	50,25%
Pendapatan pas pelabuhan dan terminal Port and terminal entry fee	**574.170.483**	461.451.471	112.719.012	24,43%
Pengusahaan tol Toll services	**225.970.691**	197.657.163	28.313.528	14,32%
Jasa maritim dan pengerukan Marine and dredging services	**216.476.077**	162.747.925	53.728.152	33,01%
Jasa logistik Logistic services	**153.709.761**	159.471.070	(5.761.309)	(3,61%)
Pendapatan pasar modal dan pasar uang Capital market and money market income	**94.311.541**	88.375.707	5.935.834	6,72%
Pelayanan jaringan dan konsultasi sistem informasi Network services and consultant of information system	**46.562.189**	100.396.739	(53.834.550)	(53,62%)
Pelayanan kesehatan Medical services	**26.761.529**	29.860.028	(3.098.499)	(10,38%)
Lain-lain Others	**102.026.718**	76.187.951	25.838.767	33,91%
Subtotal	**35.483.466.435**	32.526.653.316	2.956.813.119	9,09%

Tabel Pendapatan Operasi
Income from Operations

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pendapatan konstruksi Construction revenues	**1.244.807.617**	2.307.215.142	(1.062.407.525)	(46,05%)
Total	**36.728.274.052**	34.833.868.458	1.894.405.594	5,44%

BEBAN OPERASI

Beban operasi tahun 2025 mencapai Rp28,59 triliun, meningkat 0,82% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai Rp28,36 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan beban bahan bakar dan bahan habis pakai sebesar Rp665,53 miliar.

OPERATING EXPENSES

Operating expenses in 2025 reached Rp28.59 trillion, an increase of 0.82% compared to Rp28.36 trillion in 2024. This increase was mainly due to an increase in fuel and supplies expenses of Rp665.53 billion.

Tabel Beban Operasi
Operating Expenses

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Kerja sama mitra usaha Partnership	**7.933.198.625**	7.732.099.897	201.098.728	2,60%
Pegawai Employee	**6.465.116.046**	6.386.102.589	79.013.457	1,24%
Umum General	**3.813.299.390**	3.907.079.457	(93.780.067)	(2,40%)
Penyusutan dan amortisasi Depreciation and amortization	**3.722.550.773**	3.776.234.815	(53.684.042)	(1,42%)
Bahan bakar dan bahan habis pakai Fuels and supplies	**3.240.952.539**	2.575.421.577	665.530.962	25,84%
Pemeliharaan Maintenance	**1.528.044.957**	1.257.974.673	270.070.284	21,47%
Asuransi Insurance	**511.787.934**	395.102.234	116.685.700	29,53%
Administrasi kantor Office administration	**132.443.714**	118.501.850	13.941.864	11,77%
Subtotal	**27.347.393.978**	26.122.517.092	1.224.876.886	4,69%
Beban konstruksi Construction expenses	**1.241.429.641**	2.233.984.182	(992.554.541)	(44,43%)
Total	**28.588.823.619**	**28.356.501.274**	**232.322.345**	**0,82%**

BEBAN OPERASI LAINNYA - NETO

Beban operasi lainnya-neto tahun 2025 sebesar Rp680,94 miliar, meningkat 257,25% dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar sebesar Rp190,61 miliar. Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh penurunan nilai aset takberwujud - hak konsesi sebesar Rp332,39 miliar.

OTHER OPERATING EXPENSES - NET

Other operating expenses-net in 2025 reached Rp680.94 billion, an increase of 257.25% compared to Rp190.61 billion in 2024. This was mainly due to the Impairment of intangible assets - concession rights to Rp332.39 billion.

Tabel Beban Operasi Lainnya
Other Operating Expenses

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Amortisasi premium Amortization of premium	**162.947.086**	177.319.344	(14.372.258)	(8,11%)
Pendapatan denda Income from penalties	**103.909.589**	49.749.052	54.160.537	108,87%
Penerimaan aset build, operate, dan transfer Received of build, operate, and transfer assets	**47.238.643**	108.430.009	(61.191.366)	(56,43%)
Pemulihan provisi konsesi Recovery of concession provision	**11.764.806**	180.690.271	(168.925.465)	(93,49%)
Penurunan nilai aset takberwujud - hak konsesi Impairment of intangible assets - concession rights	**(332.386.976)**	-	(332.386.976)	100,00%
Rugi selisih kurs - neto Gain (loss) on foreign exchange - net	**(217.179.453)**	(341.011.750)	123.832.297	(36,31%)
Beban denda pajak Tax penalties	**(198.934.040)**	(297.735.447)	98.801.407	(33,18%
Penurunan nilai investasi asosiasi Impairment of investment in associate	**(92.992.278)**	-	(92.992.278)	100,00%
Penyisihan uang titipan perkara Provision for litigation deposit	**(70.000.000)**	-	(70.000.000)	100,00%
Penurunan nilai aset pengerukan alur Impairment of dredging channel assets	**(67.997.152)**	-	(67.997.152)	100,00%
Lain-lain – neto Others - net	**(27.313.669)**	(68.050.085)	40.736.416	(59,86%)
Total	**(680.943.444)**	**(190.608.606)**	**(490.334.838)**	**257,25%**

LABA OPERASI

Laba operasi tahun 2025 sebesar Rp7,46 triliun, meningkat 18,64% dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp6,29 triliun. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh pertumbuhan pendapatan operasi sebesar Rp1,90 triliun.

OPERATING INCOME

Operating income in 2025 reached Rp7.46 trillion, an increase of 18.64% compared to Rp6.29 trillion in 2024. This increase was mainly due a growth in operating revenues of Rp1.90 trillion.

Tabel Laba Usaha
Operating income

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pendapatan operasi Operating revenues	36.728.274.052	34.833.868.458	1.894.405.594	5,44%
Beban operasi Operating expenses	(28.588.823.619)	(28.382.501.274)	(206.322.345)	0,73%
Beban operasi lainnya – neto Other operating expenses - net	(680.943.444)	(190.608.606)	(490.334.838)	257,25%
Laba Operasi Operating income	7.458.506.989	6.286.758.578	1.171.748.411	18,64%

PENDAPATAN KEUANGAN

Pendapatan keuangan tahun 2025 sebesar Rp900,26 miliar, meningkat 7,32% dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp838,88 miliar. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan bunga deposito sebesar Rp58,50 miliar.

FINANCE INCOME

Finance income in 2025 reached Rp900.26 billion, an increase of 7.32% compared to Rp838.88 billion in 2024. This increase was mainly due to an increase in interest income from deposits of Rp58.50 billion.

Tabel Pendapatan Keuangan
Finance income

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pendapatan bunga deposito Interest income from deposits	**741.280.217**	682.785.656	58.494.561	8,57%
Pendapatan jasa giro Interest income on current account	**158.955.682**	155.332.963	3.622.719	2,33%
Pendapatan bunga pinjaman Interest income from loan	**28.564**	762.610	(734.046)	(96,25%)
Total	**900.264.463**	**838.881.229**	**61.383.234**	**7,32%**

BEBAN KEUANGAN

Beban keuangan tahun 2025 sebesar Rp2,97 triliun, menurun 1,26% dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp3,00 triliun. Hal tersebut terutama disebabkan oleh turunnya beban keuangan yang berasal dari beban bunga, amortisasi diskonto dan biaya transaksi sebesar Rp887,51 miliar.

FINANCE COSTS

Finance costs in 2025 reached Rp2.97 trillion, a decrease of 1.26% compared to Rp3.00 trillion in2024. This was mainly due to a decrease Interest expenses, amortization of discount and transaction cost of Rp887.51 billion.

Tabel Beban Keuangan
Finance Costs

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Beban bunga pinjaman bank Interest expenses from bank loans	**2.082.287.846**	1.254.675.561	827.612.285	65,96%
Beban bunga, amortisasi diskonto dan biaya transaksi Interest expenses, amortization of discount and transaction cost	**708.303.970**	1.595.812.355	(887.508.385)	(55,61%)
Beban bunga provisi konsesi Provision interest expenses	**83.357.030**	82.388.133	968.897	1,18%
Beban bunga sewa Lease intersest expenses	**63.641.831**	53.787.606	9.854.225	18,32%
Beban administrasi bank Bank adinistration expenses	**26.369.930**	16.559.852	9.810.078	59,24%
Beban lain-lain Other expenses	**2.775.953**	1.464.215	1.311.738	89,59%
Total	**2.966.736.560**	**3.004.687.722**	**(37.951.162)**	**(1,26%)**

BAGIAN LABA ENTITAS ASOSIASI

Bagian laba entitas asosiasi tahun 2025 sebesar Rp433,06 miliar, menurun 19,89% dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp540,56 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh tidak adanya bagian laba entitas asosiasi yang berasal dari NPCT1 pada tahun 2025.

EQUITY IN INCOME OF ASSOCIATES

The equity in income of associates in 2025 reached Rp433.06 billion, a decrease of 19.89% compared to Rp540.56 billion in 2024. This decrease was mainly due to there being no share in the profits of the associated entity originating from NPCT1 in 2025.

Tabel Bagian Laba Entitas Asosiasi
Equity in Income of Associates

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
BKMS	**307.923.409**	218.449.664	89.473.745	40,96%
JICT	**96.955.848**	144.863.008	(47.907.160)	(33,07%)
Ambapers	**16.736.445**	16.095.508	640.937	3,98%
PTI	**9.304.022**	11.371.390	(2.067.368)	(18,18%)
PHC	**4.202.819**	4.112.137	90.682	2,21%
TNU	**3.703.921**	7.236.932	(3.533.011)	(48,82%)
PCN	**243.695**	78.249	165.446	211,44%
LNG	**(1.055.167)**	922.623	(1.977.790)	(214,37%)
RSP	**(2.110.819)**	2.124.150	(4.234.969)	(199,37%)

Tabel Bagian Laba Entitas Asosiasi
Equity in Income of Associates

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
JBT	(2.840.981)	(88.288)	(2.752.693)	3.117,86%
NPCT1	-	139.753.623	(139.753.623)	(100,00%)
BNCT	-	(4.363.877)	(4.363.877)	(100,00%)
Total	433.063.192	540.555.119	(107.491.927)	(19,89%)

LABA SEBELUM PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan badan tahun 2025 sebesar Rp5,83 triliun, meningkat 24,96% dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp4,66 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pertumbuhan laba operasi sebesar Rp1,17 triliun.

INCOME BEFORE CORPORATE INCOME TAX

Income before corporate income tax in 2025 reached Rp5.09 trillion, an increase of 27.96% compared to Rp3.98 trillion 2024. This increase was in line with the growth in profit before final tax and corporate income tax of Rp1.16 trillion.

Tabel Laba Sebelum Pajak Penghasilan Badan
Income Before Corporate Income Tax

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Laba operasi Income from operations	7.458.506.989	6.286.758.578	1.171.748.411	18,64%
Pendapatan keuangan Finance income	900.264.463	838.881.229	61.383.234	7,32%
Beban keuangan Finance costs	(2.966.736.560)	(3.004.687.722)	37.951.162	(1,26%)
Bagian laba entitas asosiasi Equity in income of associates	433.063.192	540.555.119	(107.491.927)	(19,89%)
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan badan Income before final tax and corporate income tax	5.825.098.084	4.661.507.204	1.163.590.880	24,96%

BEBAN PAJAK FINAL

Beban pajak final tahun 2025 sebesar Rp730,63 miliar, meningkat 7,44% dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp680,06 miliar. Peningkatan tersebut kenaikan beban pajak final dari entitas anak sebesar Rp78,75 miliar.

FINAL TAX EXPENSE

The final tax expense in 2025 reached Rp730.63 billion, an increase of 7.44% compared to Rp680.06 billion in 2024. This increase was due to an increase in the final tax expense from subsidiaries to Rp78.75 billion.

Tabel Beban Pajak Final
Final Tax Expense

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Perusahaan Company	**356.652.066**	384.842.225	(28.190.159)	(7,33%)
Entitas anak Subsidiaries	**373.974.858**	295.221.044	78.753.814	26,68%
Beban pajak final Final tax expense	**730.626.924**	680.063.269	50.563.655	7,44%

LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BADAN

Laba sebelum pajak penghasilan badan tahun 2025 sebesar Rp5,09 triliun, meningkat 27,96% dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp3,98 triliun. Peningkatan tersebut sejalan dengan pertumbuhan laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan badan sebesar Rp1,16 triliun.

INCOME BEFORE CORPORATE INCOME TAX

Income before corporate income tax in 2025 reached Rp5.09 trillion, an increase of 27.96% compared to Rp3.98 trillion 2024. This increase was in line with the growth in profit before final tax and corporate income tax of Rp1.16 trillion.

Tabel Laba Sebelum Pajak Penghasilan Badan
Income before Corporate Income Tax

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan badan Income before corporate income tax expenses	**5.825.098.084**	4.661.507.204	1.163.590.880	24,96%
Beban pajak final Final tax expense	**(730.626.924)**	(680.063.269)	(50.563.655)	7,44%
Laba sebelum pajak penghasilan badan Income before corporate income tax expenses	**5.094.471.160**	3.981.443.935	1.113.027.225	27,96%

MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN BADAN

Beban pajak penghasilan badan tahun 2025 sebesar Rp731,17 miliar, meningkat 310,06% dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp178,31 miliar. Hal tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan beban pajak pengjasilan badan kini.

CORPORATE INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)

Corporate income tax expense in 2025 reached Rp731.17 billion, an increase of 310.06% compared to Rp178.31 billion in 2024. This was due to the growth in the corporate income tax expense.

Tabel Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Badan
Corporate Income Tax Benefit (Expense)

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Kini Current	**(1.144.790.711)**	(886.121.839)	(258.668.872)	29,19%
Tangguhan Deferred	**413.625.324**	707.815.249	(294.189.925)	(41,56%)
Manfaat (beban) pajak penghasilan badan Corporate Income Tax Benefit (Expense)	**(731.165.387)**	(178.306.590)	(552.858.797)	310,06%

LABA TAHUN BERJALAN

Laba tahun berjalan tahun 2025 sebesar Rp4,36 triliun, meningkat 14,73% dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp3,80 triliun. Peningkatan laba sejalan dengan pertumbuhan laba sebelum pajak penghasilan badan.

INCOME FOR THE YEAR

Income for the year in 2025 reached Rp4.36 trillion, an increase of 14.73% compared to Rp3.80 trillion in 2024. The increase was due to the growth in Income before corporate income tax.

Tabel Laba Tahun Berjalan
Income For The Year

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Laba sebelum pajak penghasilan badan Income before corporate income tax	**5.094.471.160**	3.981.443.935	1.113.027.225	27,96%
Manfaat (beban) pajak penghasilan badan Corporate Income Tax Benefit (Expense)				
Kini Current	**(1.144.790.711)**	(886.121.839)	(258.668.872)	29,19%
Tangguhan Deferred	**413.625.324**	707.815.249	(294.189.925)	(41,56%)
Laba Tahun Berjalan Income for the year	**4.363.305.773**	3.803.137.345	560.168.428	14,73%

Adapun laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk pada tahun 2025 mencapai Rp4,16 triliun, meningkat 16,11% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai Rp3,58 triliun. Sedangkan laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non pengendali pada tahun 2025 mencapai Rp201,98 miliar, menurun 7,90% dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp219,31 miliar.

While, income for the current period attributable to owners of the parent entity in 2025 reached Rp4.16 trillion, an increase of 16.11% compared to Rp3.58 trillion in 2024. Income for the current period attributable to non-controlling interests in 2025 reached Rp201.98 billion, a decrease of 7.90% compared to Rp219.31 billion in 2024.

Tabel Periode Berjalan Yang Dapat Diatribusikan
Attributable income for the current period

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pemilik entitas induk Owners of the parent entity	**4.161.329.930**	3.583.830.947	577.498.983	16,11%
Kepentingan non-pengendali Non-controlling interests	**201.975.843**	219.306.398	(17.330.555)	(7,90%)
Laba Periode Berjalan Profit for the Current Period	**4.363.305.773**	3.803.137.345	560.168.428	14,73%

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Penghasilan komprehensif lain tahun 2025 mencapai (Rp1,67) triliun, menurun 386,63% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai Rp580,97 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh turunnya pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi dari pengukuran kembali program imbalan pasti - neto setelah pajak.

OTHER COMPREHENSIVE INCOME

Other comprehensive income in 2025 reached (Rp 1.67) trillion, a decrease of 386.63% compared to Rp580.97 billion in 2024. The decrease was mainly due to a decrease in items that will not be reclassified to profit or loss from the remeasurement of the defined benefit plan - net after tax.

Tabel Penghasilan Komprehensif Lain
Other Comprehensive Income

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi Item that will not be reclassified to profit or loss				
Pengukuran kembali program imbalan pasti - neto setelah pajak Remeasurements of defined benefit plans - net of tax	**(1.690.586.691)**	763.117.936	(2.453.704.627)	(321,54%)
Perubahan nilai wajar aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain Change in fair value of financial assets at fair value through other comprehensive income	**215.991.882**	(173.841.358)	389.833.240	(224,25%)
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi Item that will be reclassified to profit or loss				
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan Exchange differences due to financial statements translation	**(6.614.063)**	102.980.463	(109.594.526)	(106,42%)

Tabel Penghasilan Komprehensif Lain
Other Comprehensive Income

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas Effective portion of gains and losses on hedging instrument in relation to cash flow hedge	**(184.035.117)**	(111.286.795)	(72.748.322)	65,37%
Penghasilan komprehensif lain Other Comprehensive Income	**(1.665.243.989)**	580.970.246	(2.246.214.235)	(386,63%)

TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

Laba komprehensif tahun berjalan tahun 2025 sebesar Rp2,70 triliun, menurun 38,46% dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp4,38 triliun. Penurunan tersebut sejalan dengan turunya penghasilan komprehensif lain.

TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

Comprehensive income for the year in 2025 reached Rp2.70 trillion, a decrease of 38.46% compared to Rp4.38 trillion in 2024. This decrease was due to the decrease in other comprehensive income.

Tabel Laba Komprehensif Tahun Berjalan
Total Comprehensive Income For The Year

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Laba tahun berjalan Income for the year	**4.363.305.773**	3.803.137.345	560.168.428	14,73%
Penghasilan komprehensif Lain Other Comprehensive Income	**(1.665.243.989)**	580.970.246	(2.246.214.235)	(386,63%)
Total laba komprehensif tahun berjalan Total Comprehensive Income For The Year	**2.698.061.784**	4.384.107.591	(1.686.045.807)	(38,46%)

Adapun laba komprehensif periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk pada tahun 2025 mencapai Rp2,50 triliun, menurun 40,05% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai Rp4,16 triliun. Demikian pula dengan laba komprehensif periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non pengendali pada tahun 2025 mencapai Rp201,46 miliar, menurun 8,14% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai Rp219,31 miliar.

The comprehensive income for the current period attributable to owners of the parent entity in 2025 reached Rp2.50 trillion, a decrease of 40.05% compared to Rp4.16 trillion in 2024. Likewise, comprehensive income for the period attributable to non-controlling interests in 2025 reached Rp201.46 billion, a decrease of 8.14% compared to Rp219.31 billion in 2024.

Tabel Laba Komprehensif Periode Berjalan Yang Dapat Diatribusikan
Attributable Comprehensive Income For The Year

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pemilik entitas induk Owners of the parent entity	2.496.603.203	4.164.801.193	(1.668.197.990)	(40,05%)
Kepentingan non pengendali Non-controlling interests	201.458.581	219.306.398	(17.847.817)	(8,14%)
Laba Komprehensif tahun Berjalan Attributable Comprehensive Income For The Year	2.698.061.784	4.384.107.591	(1.686.045.807)	(38,46%)

LABA PER SAHAM DASAR

Laba per saham dasar tahun 2025 sebesar Rp102.557, meningkat 16,11% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp88.325. Peningkatan tersebut sejalan pertumbuhan laba tahun berjalan. Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan total rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

BASIC EARNINGS PER SHARE

Basic earnings per share in 2025 reached Rp102,557, an increase of 16.11% compared to Rp88,325 in 2024. This increase was in line with income growth for the current year. Basic earnings per share is calculated by dividing the current year's profit attributable to the owners of the parent entity by the total weighted average shares outstanding in the year concerned.

Tabel Laba Per Saham Dasar
Basic Earnings Per Share

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Laba per saham dasar (nilai penuh) Basic Earnings Per Share (full amount)	102.557	88.325	14.232	16,11%

LABA PER SAHAM DILUSIAN

Laba per saham dilusian tahun 2025 sebesar Rp101.242, meningkat 16,11% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp87.192. Peningkatan tersebut sejalan dengan pertumbuhan laba tahun berjalan. Laba per saham dilusian dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada tahun pelaporan, yang disesuaikan untuk mengasumsikan konversi efek berpotensi saham biasa yang sifatnya dilutif.

DILUTED EARNINGS PER SHARE

Diluted earnings per share in 2025 reached Rp101,242, an increase of 16.11% compared to Rp87,192 in 2024. This increase was in line with the income growth for the current year. Diluted earnings per share is calculated by dividing the current year's profit attributable to owners of the parent entity by the weighted average number of ordinary shares outstanding in the reporting year, adjusted to assume conversion of dilutive potential ordinary shares.

Tabel Laba Per Saham Dilusian
Diluted Earnings Per Share

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Laba per saham dilusian (nilai penuh) Diluted Earnings Per Share (full amount)	**101.242**	87.192	14.050	16,11%

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS

Tabel Laporan Arus Kas Konsolidasian
Consolidated Statement of Cash Flows

(dalam jutaan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES				
Penerimaan kas dari pelanggan Cash receipts from customers	**35.488.258.130**	35.081.096.090	407.162.040	1,16%
Penerimaan pendapatan bunga Receipt of interest income	**158.955.682**	138.307.745	20.647.937	14,93%
Pembayaran kepada kontraktor, pemasok dan lainnya Payment to contractors, suppliers and others	**(21.090.934.600)**	(14.689.152.169)	(6.401.782.431)	43,58%
Pembayaran kepada karyawan Payment to employees	**(5.605.354.721)**	(7.407.666.379)	1.802.311.658	(24,33%)
Pembayaran pajak penghasilan Payment for income taxes	**(1.276.784.824)**	(1.210.529.494)	(66.255.330)	5,47%
Penerimaan (pembayaran) pajak Tax receipt (payment)	**486.432.713**	288.092.252	198.340.461	68,85%
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi Net Cash Provided by Operating Activities	**8.160.572.380**	12.200.148.045	(4.039.575.665)	(33,11%)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES				
Pengembalian modal dari entitas asosiasi Refund of capital from associates	**52.920.000**	-	52.920.000	100,00%
Pencairan investasi jangka pendek Withdrawal of short-term investments	**852.989.150**	4.074.963.760	(3.221.974.610)	(79,07%)
Penerimaan dividen dari entitas asosiasi Receipt of dividend from associates	**185.531.783**	181.804.647	3.727.136	2,05%
Hasil penjualan aset tetap Proceed on sales of fixed assets	**27.790.798**	11.889.146	15.901.652	133,75%
Perolehan aset tetap, properti investasi dan aset tak berwujud Acquisition of fixed assets, investment properties and intangible assets	**(2.624.617.264)**	(5.140.358.970)	2.515.741.706	(48,94%)
Penempatan kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya Placement of restricted cash and cash equivalents	**(1.424.986.903)**	(1.268.054.099)	(156.932.804)	12,38%
Pembayaran uang muka aset tetap Payment of advances for fixed assets	**(351.554.124)**	(27.848.535)	(323.705.589)	1.162,38%
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi Net Cash Used in Investing Activities	**(3.281.926.560)**	(2.167.604.051)	(1.114.322.509)	51,41%

Tabel Laporan Arus Kas Konsolidasian
Consolidated Statement of Cash Flows

(dalam jutaan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES				
Penerimaan pinjaman Receipt of loans	**22.633.108.904**	9.928.858.552	12.704.250.352	127,95%
Pembayaran pinjaman bank dan utang obligasi Payment of bank loans and bonds payable	**(27.164.733.851)**	(8.089.799.531)	(19.074.934.320)	235,79%
Pembayaran bunga Interest payment	**(2.758.777.627)**	(2.991.656.809)	232.879.182	(7,78%)
Pembayaran dividen Payment of dividend	**(1.788.523.268)**	(1.152.575.231)	(635.948.037)	55,18%
Pembayaran liabilitas sewa Payments of lease liabilities	**(585.313.070)**	(185.720.560)	(399.592.510)	215,16%
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan Net Cash Used in Financing Activities	**(9.664.238.912)**	(2.490.893.579)	(7.173.345.333)	287,98%
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS	**(4.785.593.091)**	7.541.650.415	(12.327.243.506)	(163,46%)
Dampak perubahan selisih kurs terhadap kas dan setara kas Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents	**41.849**	320.019.281	(319.977.432)	(99,99%)
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE YEAR	**20.352.943.946**	12.491.274.250	7.861.669.696	62,94%
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF YEAR	**15.567.392.704**	20.352.943.946	(4.785.551.242)	(23,51%)

Grafik Laporan Arus Kas Konsolidasian
Consolidated Statement of Cash Flows

(dalam jutaan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

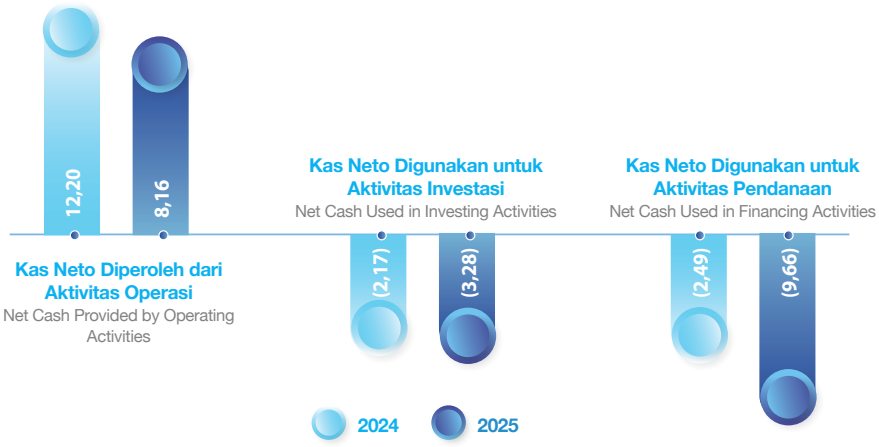

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi tahun 2025 mencapai Rp8,16 triliun, menurun 33,11% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai Rp12,20 triliun. Hal tersebut antara lain dipengaruhi pembayaran kepada kontraktor, pemasok dan lainnya.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi tahun 2025 mencapai Rp3,28 triliun, meningkat 51,41% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai Rp2,17 triliun. Hal tersebut antara lain dipengaruhi perolehan aset tetap, properti investasi dan aset tak berwujud.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan tahun 2025 mencapai Rp9,66 triliun, meningkat 287,98% dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai Rp2,50 triliun. Hal tersebut antara lain dipengaruhi oleh peningkatan pembayaran pinjaman bank dan utang obligasi.

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG DAN KOLEKTIBILITAS PIUTANG

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG

PERLINDUNGAN HAK KREDITUR

Perseroan memiliki kebijakan perlindungan kreditur yang tertuang dalam Pedoman *Good Corporate Governance* Pelindo Nomor:HK. 01/13/12/4/TKPT/UTMA/PLND-23 Tanggal 13 Desember 2023. Perseroan menjunjung hak-hak para Kreditur dengan menghormati kewajiban sesuai kontrak dan menyampaikan informasi yang diperlukan yang harus diungkapkan berdasarkan undang-undang,

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES

Net cash from operating activities in 2025 reached Rp8.16 trillion, a decrease of 33.11% compared to Rp12.20 trillion in 2024. This was due to payments to contractors, suppliers and others.

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES

Net cash used for investment activities in 2025 reached Rp3.28 trillion, an increase of 51.41% compared to Rp2.17 trillion in 2024. This was due to the acquisition of fixed assets, investment property and intangible assets.

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES

Net cash used for funding activities in 2025 reached Rp9.66 trillion, an increase of 287.98% compared to Rp2.50 trillion in 2024. This was due to the increase in bank loan payments and bonds payable.

ABILITY TO PAY DEBT AND RECEIVABLES COLLECTIBILITY

ABILITY TO PAY DEBT

PROTECTION OF CREDITORS' RIGHTS

The Company has a creditor protection policy as stated in the PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Good Corporate Governance Guidelines No. HK. 01/13/12/4/TKPT/UTMA/PLND-23 Dated December 13, 2023. The Company upholds the rights of Creditors by respecting its obligations according to the contract and conveying the necessary information that must be disclosed based on the law, other

peraturan lain yang berlaku serta *best practice*. Kebijakan umum terkait dengan Perlindungan Kreditur diantaranya:

1. Perseroan mengakui hak-hak para Kreditur yang ditetapkan berdasarkan aturan hukum atau melalui persetujuan bersama dan harus mendorong terjadinya kerjasama yang aktif dalam menciptakan keberlangsungan badan usaha yang sehat secara finansial.
2. Apabila terdapat praktik-praktik tidak sah atau tidak etis, Kreditur dapat menyampaikan perhatiannya langsung kepada Direksi dan tindakan ini tidak merusak hak-hak mereka yang dilindungi undang-undang dan peraturan.

applicable regulations and best practices. General policies related to Creditor Protection include:

1. The Company recognizes the rights of Creditors that are determined based on legal regulations or through mutual agreement and encourages active cooperation in creating the sustainability of a financially healthy business entity.

2. If there are illegal or unethical practices, Creditors can report this directly to the Board of Directors and this action will not damage their rights protected by laws and regulations.

Kemampuan Pelindo dalam memenuhi kewajibannya dapat dilihat dari sejumlah indikator, misalnya kondisi keuangan jangka pendek dan kondisi keuangan jangka panjang. Kemampuan membayar hutang jangka pendek tercermin dari rasio likuiditas sedangkan kemampuan membayar hutang jangka panjang tercermin dari rasio solvabilitas. Rasio likuiditas dan rasio solvabilitas disajikan sebagai berikut.

Pelindo's ability to fulfill its obligations can be seen from a number of indicators, for example short-term financial conditions and long-term financial conditions. The ability to pay short-term debt is reflected in the liquidity ratio, while the ability to pay long-term debt is reflected in the solvency ratio. Liquidity ratios and solvency ratios are presented as follows.

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG JANGKA PENDEK (LIKUIDITAS)

Rasio likuiditas diukur dengan menggunakan rasio kas (*cash ratio*) dan rasio lancar (*current ratio*). Rasio kas diperoleh dari penambahan nilai kas, deposito, dan surat berharga jangka pendek, lalu dibagi dengan nilai liabilitas jangka pendek. Sedangkan rasio lancar diperoleh dari pembagian nilai aset lancar dengan liabilitas jangka pendek.

ABILITY TO PAY SHORT TERM DEBT (LIQUIDITY)

Liquidity ratios are measured using the cash ratio and current ratio. The cash ratio is obtained from adding the value of cash, deposits and short-term securities, then dividing it by the value of short-term liabilities. While, the current ratio is obtained from dividing the value of current assets by short-term liabilities.

Tabel Likuiditas
Liquidity

(dalam %)
(in %)

Likuiditas Liquidity	2025	2024	Kenaikan/(Penurunan) Increase/Decrease
Rasio Kas *(cash ratio)*	**82,41%**	65,24%	17,17%
Rasio Lancar *(current ratio)*	**113,54%**	83,38%	30,16%

Rasio kas tahun 2025 mencapai 82,41%, mengalami peningkatan sebesar 17,17% dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 66,44%. Demikian pula dengan rasio lancar tahun 2025 mencapai 113,54% mengalami peningkatan sebesar 30,16% dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 83,38%. Peningkatan rasio kas dan rasio lancar dipengaruhi adanya penurunan liabilitas jangka pendek pada tahun 2025.

The cash ratio in 2025 was 82.41%, an increase of 17.17% compared 66.44% in 2024. Likewise, the current ratio in 2025 was 113.54%, an increase of 30.16% compared to 83.38% in 2024. The increase in the cash ratio and current ratio was due to a decrease in current liabilities in 2025.

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG JANGKA PANJANG (SOLVABILITAS)

Rasio solvabilitas yang menunjukkan kemampuan Perseroan dalam membayar kewajiban-kewajibannya khususnya kewajiban jangka panjang. Uraian mengenai rasio solvabilitas dijabarkan sebagai berikut.

ABILITY TO PAY LONG TERM DEBT (SOLVENCY)

The Solvency ratio indicates the Company's ability to pay its obligations, especially long-term obligations. A description of the solvency ratio is as follows.

Tabel Solvabilitas
Solvency

(dalam %)
(in %)

Likuiditas Liquidity	2025	2024	Kenaikan/(Penurunan) Increase/Decrease
Return on Assets (ROA)	**3,46%**	2,98%	0,48%
Return on Equity (ROE)	**8,66%**	7,58%	1,08%
Return on Invesment (ROI)	**7,26%**	6,81%	0,45%
Debt to Equity (DER)	**99,69%**	102,64%	(2,95%)

ROA tahun 2025 mencapai 3,46%, mengalami peningkatan sebesar 0,48% dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 2,98%. ROE tahun 2025 mengalami peningkatan menjadi 8,66%, begitupula ROI juga mengalami peningkatan menjadi 7,26%. DER mengalami penurunan dari 102,64% pada tahun 2024 menjadi 99,69% pada tahun 2025. Penurunan ini mencerminkan perbaikan struktur permodalan serta meningkatnya kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya.

ROA in 2025 was 3.46%, an increase of 0.48% compared to 2.98% in 2024. ROE in 2025 increased to 8.66%, and ROI also increased to 7.26%. The DER decreased from 102.64% in 2024 to 99.69% in 2025. This decrease reflects an improvement in the Company's capital structure and its increased ability to meet its long-term obligations.

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG DARI EFEK YANG DITERBITKAN

Kemampuan membayar utang juga dapat tercermin berdasarkan peringkat obligasi, obligasi secara rutin dinilai oleh lembaga pemeringkatan guna mendukung kelayakan obligasi yang diterbitkan. Obligasi ini tercatat di Bursa Efek Singapura dan telah meraih peringkat internasional dari berbagai lembaga pemeringkat yaitu *Standard and Poor's* (S&P), Moody's dan Fitch serta Pefindo.

ABILITY TO PAY DEBT FROM ISSUED SECURITIES

The ability to repay debt can also be reflected based on bond ratings, bonds are routinely assessed by rating agencies to support the suitability of the bonds issued. These bonds are listed on the Singapore Stock Exchange and have received international ratings from rating agencies, including Standard and Poor's (S&P), Moody's and Fitch and Pefindo.

Tabel Kemampuan Membayar Hutang dari Obligasi Global
Ability to Pay Global Bonds

Uraian Description	Peringkat Rating			
	2025		2024	
Obligasi Global dan Domestik Global and Domestic Bonds	• Moody's • Fitch • Pefindo • Moody's • Fitch • Pefindo	: Baa2 (*Stable*) : BBB (*Stable*) : AAA (*Stable*) : Baa2 (*Stable*) : BBB (*Stable*) : AAA (*Stable*)	• Moody's • Fitch • Pefindo • Moody's • Fitch • Pefindo	: Baa2 (*Stable*) : BBB (*Stable*) : AAA (*Stable*) : Baa2 (*Stable*) : BBB (*Stable*) : AAA (*Stable*)

Adapun definisi dari setiap peringkat obligasi yang diberikan adalah sebagai berikut.

The definition of each bond rating is as follows.

Tabel Definisi Peringkat Obligasi Global
Global Bond Rating Definition

Pemeringkat Rating		
Moody's	Baa2	Obligasi dengan risiko moderat dan oleh karenanya memiliki karakteristik spekulatif, peringkat lebih tinggi dibandingkan Baa3. Bonds with moderate risk and therefore speculative characteristics are rated higher than Baa3.
	Baa3	Obligasi dengan risiko moderat dan oleh karenanya memiliki karakteristik spekulatif. Bonds with moderate risk and therefore have speculative characteristics.

Tabel Definisi Peringkat Obligasi Global
Global Bond Rating Definition

Pemeringkat Rating		
Fitch	BBB	Termasuk kedalam kategori peringkat investasi kualitas menengah - resiko menengah yang saat ini dalam kondisi memuaskan. Included in the investment category of medium quality - medium risk and currently in a satisfactory condition.
Pefindo	AAA	Kemampuan obligor untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjangnya, relatif terhadap obligor Indonesia lainnya. The obligor's ability to meet its long-term financial commitments, relative to other Indonesian obligors.
	AA	Kemampuan obligor untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjang atas efek utang tersebut, dibandingkan dengan obligor lainnya di Indonesia, adalah sangat kuat. The obligor's ability to meet its long-term financial commitments for these debt securities, compared to other obligors in Indonesia, is very strong.
Outlook		
Stable	Indikasi prospek yang stabil sehingga hasil peringkat akan stabil. Indication of stable prospects so the rating results are stable.	
Positive	Prospek yang berpotensi untuk menaikkan peringkat. Prospects with the potential to raise their rating.	
Tanda tambah (+) plus sign (+)	Pada peringkat tertentu menunjukkan bahwa peringkat tersebut relatif kuat dalam masing-masing kategori peringkat. A rating that indicates the ranking is relatively strong in each rating category.	
Tanda minus (-) minus sign (-)	Pada peringkat tertentu menunjukkan bahwa peringkat tersebut relatif lemah dalam masing-masing kategori peringkat. A rating that indicates the ranking is relatively weak in each rating category.	

KOLEKTIBILITAS PIUTANG

Average Collection Period (ACP) merupakan suatu rasio yang menjadi referensi yang menunjukkan berapa lama waktu yang diperlukan oleh Perseroan untuk menerima pembayaran dari pengguna jasa dalam rangka pelunasan piutang usaha. Semakin kecil nilai ACP menggambarkan Perseroan mampu menerima pembayaran pelunasan piutang lebih cepat.

Pada tahun 2025, realisasi ACP, dengan mempertimbangkan hanya piutang yang telah difakturkan, tercatat sebesar 14 hari, mengalami penurunan dari tahun 2024. Hal ini dipengaruhi oleh adanya penurunan saldo rata- rata piutang usaha pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan tersebut terutama berasal dari piutang yang berada dalam kategori aging lancar (belum jatuh tempo), yang menunjukkan bahwa peningkatan piutang masih berada dalam batas waktu penagihan yang sehat. Di sisi lain, pendapatan usaha juga mengalami kenaikan pada tahun 2025, yang turut memengaruhi rasio ACP tetap stabi

RECEIVABLES COLLECTIBILITY

The Average Collection Period (ACP) is a ratio that shows how long it takes for the Company to receive payments from service users in order to pay off trade receivables. The lower the ACP value is indicates that the Company is able to receive receivables payments more quickly.

In 2025, the accounts receivable turnover (ACP), considering only invoiced receivables, stood at 14 days, a decrease from 2024. This was influenced by a decline in the average trade receivables balance in 2025 compared to the previous year. This decrease primarily stemmed from accounts receivable in the current aging category (not yet past due), indicating that the increase in accounts receivable remained within a healthy collection timeframe. On the other hand, operating revenue also increased in 2025, which helped keep the ACP ratio stable.

Tabel Kolektibilitas Piutang
Receivables Collectibility

Uraian Description	Satuan	2025	2024	Kenaikan/(Penurunan) Increase/Decrease
Average Collection Period (ACP)	Hari	14	(2)	

Kolektibilitas piutang berdasarkan analisis umur piutang usaha masih dalam kategori baik, sehingga dapat mendukung kegiatan Perseroan.

Receivables Collectability based on trade receivables aging analysis is still in the good category, so it can support the Company's activities.

Tabel Analisis Umur Piutang Usaha
Accounts Receivable Aging Analysis

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Analisis UmurPiutang Usaha Accounts Receivable Aging Analysis	2025	2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
Belum jatuh tempo Not yet due				
Belum difakturkan Not yet invoiced	**651.525.830**	511.707.589	139.818.241	27,32%
Sudah difakturkan Invoiced	**399.430.093**	593.702.586	(194.272.493)	(32,72%)
Lewat jatuh tempo Past due				
1-90 hari 1-90 days	**774.970.358**	822.598.879	(47.628.521)	(5,79%)
91-180 hari 91-180 days	**107.315.716**	96.023.747	11.291.969	11,76%
Lebih dari 180 hari More than 180 days	**1.159.166.916**	1.193.661.742	(34.494.826)	(2,89%)
Subtotal	**3.092.408.913**	**3.217.694.543**	**(125.285.630)**	**(3,89%)**
Dikurangi: Penyisihan penurunan nilai Less: Allowance for impairment	**(1.161.657.449)**	(1.204.532.621)	42.875.172	(3,56%)
Neto	**1.930.751.464**	**2.013.161.922**	**(82.410.458)**	**(4,09%)**

STRUKTUR MODAL

RINCIAN STRUKTUR MODAL

Komposisi struktur modal Pelindo pada tahun 2025 terdiri atas 60,05% liabilitas dan 39,95% ekuitas. Komposisi tersebut sedikit berubah dibandingkan tahun 2024, di mana porsi liabilitas tercatat sebesar 60,64% dan ekuitas sebesar 39,36%.

CAPITAL STRUCTURE

CAPITAL STRUCTURE DETAILS

The capital structure composition in 2025 Pelindo comprised 60.05% from liabilities, and 39.95% from equity. This composition changed slightly compared to 2024, where the liability portion was 60.64% and equity was 39.36%.

Tabel Rincian Struktur Modal
Capital Structure Details

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2025		2024		Kenaikan/(Penurunan) Increase/Decrease	
	Nominal (Rp)	Komposisi Composition (%)	Nominal (Rp)	Komposisi Composition (%)	Nominal (Rp)	Komposisi Composition (%)
Liabilitas jangka pendek Current Liabilities	**18.891.313.053**	**14,99%**	31.198.794.966	24,47%	(12.307.481.913)	(9,48%)
Liabilitas jangka panjang (utang berbasis bunga) Long-Term Liabilities (interest-based debt)	**56.805.888.900**	**45,06%**	46.122.088.044	36,17%	10.683.800.856	8,89%
Total liabilitas Total liabilities	**75.697.201.953**	**60,05%**	77.320.883.010	60,64%	(1.623.681.057)	(0,59%)

Tabel Rincian Struktur Modal
Capital Structure Details

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	2025		2024		Kenaikan/(Penurunan) Increase/Decrease	
	Nominal (Rp)	Komposisi Composition (%)	Nominal (Rp)	Komposisi Composition (%)	Nominal (Rp)	Komposisi Composition (%)
Total ekuitas Total equity	**50.357.603.766**	**39,95%**	50.186.852.749	39,36%	170.751.017	0,59%
Total liabilitas dan ekuitas Total liabilities and equity	**126.054.805.719**	**100,00%**	127.507.735.759	100,00%	(1.452.930.040)	0,00%

Struktur modal terkait dengan struktur modal kerja jangka pendek (likuiditas) telah disajikan pada bagian kemampuan membayar hutang dalam Laporan Tahunan ini.

Capital structure related to short-term working capital structure (liquidity) can be found in the debt repayment capacity section of this Annual Report.

KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

Dalam mengelola permodalannya, Pelindo senantiasa mempertahankan kelangsungan usaha serta memaksimalkan manfaat bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, dan untuk memberikan imbal hasil yang memadai kepada pemegang saham dengan menentukan harga produk dan jasa yang sepadan dengan tingkat risiko. Untuk itu, Perseroan menetapkan sejumlah rasio modal sesuai proporsi terhadap risiko. Pelindo secara aktif dan rutin menelaah dan mengelola permodalannya untuk memastikan struktur modal dan pengembalian yang optimal bagi pemegang saham, dengan mempertimbangkan efisiensi penggunaan modal berdasarkan arus kas operasi dan belanja modal, serta mempertimbangkan kebutuhan modal di masa yang akan datang. Dewan Komisaris dan Direksi melakukan evaluasi kesesuaian kebijakan struktur modal dengan tujuan strategis Perseroan beserta selera risiko (*risk appetite*) yang telah ditetapkan.

MANAGEMENT POLICY ON CAPITAL STRUCTURE

When managing its capital, Pelindo always considers business continuity and maximizes benefits for shareholders and other stakeholders, and provides adequate returns to shareholders by determining product and service prices commensurate with the level of risk. For this reason, the Company has determined a number of capital ratios in proportion to risk. Pelindo actively and routinely reviews and manages its capital to ensure capital structure and optimal returns for shareholders, by considering the efficiency of capital use based on operating cash flow and capital expenditure, as well as by considering future capital needs. The Board of Commissioners and Board of Directors evaluate the suitability of the capital structure policy with the Company's strategic objectives along with the established risk appetite.

DASAR PEMILIHAN KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

Pelindo mengelola struktur modal dan hasil pengembalian kepada pemegang saham yang optimal dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan modal masa depan dan profitabilitas baik masa sekarang maupun yang akan datang, perkiraan arus kas operasi, estimasi belanja modal, dan proyeksi peluang investasi yang strategis.

BASIS FOR THE CAPITAL STRUCTURE MANAGEMENT POLICY

Pelindo manages its capital structure and optimal returns to shareholders while taking into account future capital needs and current and future profitability, estimated operating cash flows, estimated capital expenditure, and projected strategic investment opportunities.

IKATAN MATERIAL INVESTASI BARANG MODAL

Pelindo melakukan ikatan material untuk investasi barang modal yang disajikan sebagai berikut.

MATERIAL CAPITAL GOODS INVESTMENT COMMITMENTS

Pelindo has commitments for material capital goods investments, which are presented as follows.

Tabel Ikatan Material Investasi Barang Modal
Material Capital Goods Investment Commitments

No.	Jenis Ikatan Type of Commitment	Nama Pihak (Vendor) Pelaksana Program Name of the Party (Vendor) Executing the Program	Mata Uang yang menjadi Denominasi Denominated Currency
	Tahun 2025 **2025**		
1	Pembangunan Akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru/ *New Priok Eastern Access* (NPEA) Seksi II: STA. 2+777 (P38) - STA. 6+625.222 (A2) Construction of New East Tanjung Priok Port Access (NPEA) Section II: STA. 2+777 (P38) - STA. 6+625,222 (A2)	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Rupiah
2	Pembangunan Akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru/ *New Priok Eastern Access* (NPEA) Seksi I: STA. 0+000 (IC NPEA) - STA. 2+777 (P38) Construction of New East Tanjung Priok Port Access (NPEA) Section I: STA. 0+000 (IC NPEA) - STA. 2+777 (P38)	Hutama - Abipraya KSO	Rupiah
3	Pengadaan Sistem Kelistrikan Pendukung Operasional 4 Unit E-RTG Berikut Instalasi di Terminal Petikemas Koja Procurement of Operational Supporting Electrical System for 4 E-RTG Units Following Installation at Koja Container Terminal	PT Lamong Energi Indonesia	Rupiah
4	*Leveling* Jalan *Coaster* Sisi Selatan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang Leveling of Coaster Road on the South Side of Tanjung Emas Harbor, Semarang	PT Berkah Indonesia Mesin Angkat	Rupiah
5	Pekerjaan Perkuatan Dermaga Perawang Perawang Pier Strengthening Work	PT Berkah Indonesia Mesin Angkat	Rupiah
	Tahun 2024 **2024**		
1	Pembangunan Pelabuhan Terminal kijing Kijing Terminal Port Development	• PT Wijaya Karya (Persero) Tbk • PT Yodya Karya (Persero) • PT ITS Tekno Sains	Rupiah

TUJUAN IKATAN MATERIAL INVESTASI BARANG MODAL

Pada tahun 2025 dan 2024, Pelindo melakukan ikatan material sebagai komitmen untuk jaminan keamanan pembayaran dalam rangka peningkatan kapasitas, produktivitas, dan pelayanan untuk membangun dermaga, lapangan penumpukan, serta melengkapi alat bongkar/muat, dan pengerukan.

PURPOSE OF MATERIAL CAPITAL GOODS INVESTMENT BONDS

In 2025 and 2024, Pelindo had material bonds as a commitment to guarantee payment security to increase capacity, productivity, and services to build docks, stacking yards, and complete loading/unloading equipment, and dredging.

SUMBER DANA

Sumber pendanaan atas ikatan material investasi barang modal berasal dari dana internal Pelindo dan *commercial loan*/obligasi.

SOURCE OF FUNDS

The source of funds for the material capital goods investment bonds originates from Pelindo's internal funds and commercial loans/bonds.

LANGKAH PERLINDUNGAN RISIKO MATA UANG DAN PERPAJAKAN

Dalam ikatan yang terjadi pada tahun 2025 dan 2024, tidak terdapat ikatan dalam mata uang asing sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia terkait dengan kewajiban penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

CURRENCY RISK PROTECTION MEASURES

In 2025 and 2024, there were no bonds in foreign currencies in accordance with Bank Indonesia Regulations related to the obligation to use Rupiah in all transactions within the State of the Republic of Indonesia.

INFORMASI KEUANGAN YANG TELAH DILAPORKAN YANG MENGANDUNG KEJADIAN YANG SIFATNYA LUAR BIASA DAN JARANG TERJADI

Selama tahun 2025, Perseroan tidak memiliki informasi keuangan yang telah dilaporkan yang mengandung kejadian yang sifatnya luar biasa dan jarang terjadi.

DAMPAK PERUBAHAN HARGA TERHADAP PENJUALAN ATAU PENDAPATAN BERSIH PERSEROAN

Selama tahun 2025, Perseroan tidak terkena dampak yang signifikan terhadap perubahan harga penjualan atau pendapatan bersih Perseroan.

KOMPONEN-KOMPONEN SUBSTANSI DARI PENDAPATAN DAN BEBAN LAINNYA

Selama tahun 2025, tidak terdapat komponen-komponen dari pendapatan dan beban lainnya yang nilainya sama atau lebih 20% dari total nilai pendapatan dan beban lainnya.

PENINGKATAN/PENURUNAN MATERIAL DARI PENJUALAN/ PENDAPATAN BERSIH

Selama tahun 2025, tidak terdapat peningkatan maupun penurunan material dari penjualan/pendapatan bersih.

INVESTASI BARANG MODAL

Investasi berupa barang modal *(capital expenditure)* merupakan aktivitas pengeluaran dana yang digunakan untuk membeli sejumlah aset tetap atau menambah nilai aset tetap yang diharapkan dapat memberikan nilai manfaat di masa depan.

JENIS DAN NILAI INVESTASI

Investasi barang modal yang terealisasi pada tahun 2025 sebesar Rp6,59 triliun, meningkat 18,94% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp5,55 triliun. Adapun rincian per jenis terkait nilai investasi barang modal diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

FINANCIAL INFORMATION THAT HAS BEEN REPORTED THAT CONTAINS EVENTS THAT ARE EXTRAORDINARY AND RARELY OCCUR

During 2025, the Company had no reported financial information that included events of an extraordinary or rare nature.

IMPACT OF PRICE CHANGES ON SALES OR NET INCOME OF THE COMPANY

During 2025, the Company was not significantly affected by changes in sales prices or net revenue.

SUBSTANTIAL COMPONENTS OF OTHER INCOME AND EXPENSES

During 2025, no single component of revenue or other expenses accounted for 20% or more of the total revenue and other expenses.

MATERIAL INCREASE/DECREASE OF SALES/NET REVENUE

During 2025, there was neither a significant increase nor a significant decrease in net sales/revenue.

INVESTMENTS IN CAPITAL GOODS

Investments in capital goods (capital expenditure) is the activity of using funds to purchase fixed assets or to increase the value of fixed assets that are expected to provide beneficial value in the future.

TYPE AND VALUE OF INVESTMENTS

Realized capital goods investment in 2025 amounted to Rp6.59 trillion, an increase of 18.94% compared to Rp5.55 trillion in 2024. The investment type and value of capital goods are shown in the following table:

Tabel Jenis dan Nilai Investasi Barang Modal
Investment Type and Value

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

No.	Jenis Type	Nilai Realisasi Tahun 2025 2025 Value	Nilai Realisasi Tahun 2024 2024 Value	Pertumbuhan Growth	
				Rp	%
1	Bangunan Fasilitas, Jalan, Bangunan, Sarana dan Prasarana, Kapitalisasi Bunga Port Building Facilities, Roads, Buildings, Facilities and Infrastructure, Interest Capitalization	**3.157.259**	3.843.209	(685.950)	(17,85%)
2	Alat-Alat Fasilitas, Instalasi Fasilitas, Peralatan dan Perlengkapan, Kapal dan Kendaraan Equipment Facilities, Installation Facilities, Equipment and Supplies, Vessels and Vehicles	**314.182**	223.676	90.506	40,46%
3	Tanah dan Hak atas Tanah, dan Emplasemen Land and Land Rights, and Emplacements	**29.014**	60.438	(31.424)	(51,99%)
4	Investasi Non Fisik Non Physical Investment	**193.296**	171.839	21.457	12,49%
5	Total Investasi Perusahaan Induk Total Parent Company Investment	**3.693.751**	4.299.164	(605.413)	(14,08%)
6	Investasi Entitas Anak Subsidiary Investment	**2.902.590**	1.246.551	1.656.039	132,85%
7	Total Investasi Konsolidasi Total Consolidated Investment	**6.596.341**	5.545.715	1.050.626	18,94%

Catatan: Nilai realisasi investasi barang modal tidak termasuk realisasi Investasi Penyertaan Modal sebesar Rp1,91 triliun pada tahun 2025.
Note: The realized value of capital goods investments does not include the realization of capital investment of Rp1.91 trillion in 2025.

BANGUNAN FASILITAS PELABUHAN, JALAN, BANGUNAN, SARANA DAN PRASARANA, KAPITALISASI BUNGA

Bangunan fasilitas, jalan, bangunan, sarana dan prasarana, kapitalisasi bunga tahun 2025 terealisasi sebesar Rp3,16 triliun, lebih rendah sebesar 17,85% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yang sebesar Rp3,84 triliun. Serapan investasi terbesar tahun 2025 diantaranya oleh:

1. Kantor Pusat - Pembangunan Terminal Kalibaru Utara Tahap I terealisasi sebesar Rp788,6 miliar.
2. Kantor Pusat - Pekerjaan Lanjutan Pengerukan Alur dan Kolam Pelabuhan Benoa tahun 2024 terealisasi sebesar Rp162,9 miliar.
3. Kantor Pusat - Pekerjaan Pembangunan Terminal Multipurpose Batang terealisasi sebesar Rp150,3 miliar.
4. Kantor Pusat - Pembangunan Pelabuhan Kijing phase 1 terealisasi sebesar Rp88,3 miliar.
5. Kantor Pusat - Pengembangan Pelabuhan Benoa terealisasi sebesar Rp34,6 miliar.
6. Kantor Pusat - Perkuatan dan pendalaman Dermaga ex. JICT 2 terealisasi sebesar Rp358,1 miliar.
7. Regional 1 - Pekerjaan Pengerukan Kolam Dermaga Dumai terealisasi sebesar Rp21,1 miliar.
8. Regional 2 - Pekerjaan Penanggulangan Abrasi di Pelabuhan Pulau Baai Regional 2 Bengkulu terealisasi sebesar Rp108,8 miliar.
9. Regional 3 - Pekerjaan Peninggian Dermaga di Pelabuhan Semarang terealisasi sebesar Rp127,2 miliar.

BUILDING PORT FACILITIES, ROADS, BUILDINGS, FACILITIES AND INFRASTRUCTURE, INTEREST CAPITALIZATION

Building facilities, roads, buildings, facilities and infrastructure, realized interest capitalization in 2025 reached Rp3.16 trillion, a decrease of 17.85% compared to Rp3.84 trillion in 2024. The largest investment absorption in 2025 included:

1. Head Office - Construction of North Kalibaru Terminal Phase I was realized at Rp788.6 billion.
2. Head Office - Continued Dredging Work on the Benoa Port Channel and Pool in 2025 was realized at Rp162.9 billion.
3. Head Office - Batang Multipurpose Terminal Construction work was realized at Rp150.3 billion.
4. Head Office - Construction of Kijing Port phase 1 was realized at Rp88.3 billion.
5. Head Office - Development of Benoa Port was realized at Rp34.6 billion.
6. Head Office - Strengthening and deepening of the ex Pier. JICT 2 was realized at Rp358.1 billion.
7. Regional 1 - Dumai Pier Pool Dredging Work was realized at Rp21.1 billion.
8. Regional 2 - Abrasion prevention work at Pulau Baai Harbor Regional 2 Bengkulu was realized at Rp108.8 billion.
9. Regional 3 - Pier elevation work at Semarang Port was realized at Rp127.2 billion.

10. Regional 3 - Perkuatan Dermaga Timur Terminal Berlian Jangka Pendek terealisasi sebesar Rp40,5 miliar.
11. Regional 3 - Perkuatan Struktur Dermaga Kalimas terealisasi sebesar Rp25 miliar.
12. Regional 4 - Revitalisasi Dermaga dan Perbaikan Talud terealisasi sebesar Rp3,5 miliar.
13. Kantor Pusat - Kapitalisasi bunga terealisasi sebesar Rp403,6 miliar.

ALAT-ALAT FASILITAS, INSTALASI FASILITAS, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN, KAPAL DAN KENDARAAN

Alat-alat fasilitas, instalasi fasilitas, peralatan dan perlengkapan, kapal dan kendaraan tahun 2025 terealisasi sebesar Rp314,18 miliar, meningkat sebesar 40,46% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yang sebesar Rp223,68 miliar. Dengan serapan investasi terbesar diantaranya oleh:

1. Kantor Pusat - Pekerjaan penggantian QCC 1,2,3 Panamax ke QCC Super Post Panamax, pengadaan 4 Unit RTGC, pengadaan 1 Unit reach stacker, pengadaan 6 Unit Terminal Tractor dan pengadaan 6 Unit Chassis terealisasi sebesar Rp215 miliar.
2. Regional 1 - Elektrifikasi Container Crane Di Terminal Petikemas Belawan terealisasi sebesar Rp14,6 miliar.
3. Regional 2 - Pengadaan Fasilitas Gangway Penumpang Mobile di Pelabuhan Tanjung Priok terealisasi sebesar Rp1,35 miliar.
4. Regional 3 - Peremajaan Gardu Listrik Pelabuhan Tanjung Perak terealisasi sebesar Rp8,9 miliar.

TANAH DAN HAK ATAS TANAH, DAN EMPLASEMEN

Tanah dan hak atas tanah, dan emplasemen tahun 2025 terealisasi sebesar Rp29,01 miliar, menurun sebesar 51,99% dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar Rp60,44 miliar, dengan serapan investasi tahun 2024 antara lain:

1. Kantor Pusat - Pensertifikatan Tanah Pelindo terealisasi sebesar Rp36,2 miliar.
2. Regional 2 - Pematangan Lahan Sungai Lais terealisasi sebesar Rp7,5 miliar.
3. Pekerjaan Penanganan Banjir di Pelabuhan Tanjung Emas terealisasi sebesar Rp10,6 miliar.
4. Pekerjaan Pembuatan Pagar Keliling Batas Tanah HPL Pelabuhan Badas terealisasi sebesar Rp1,04 miliar.

INVESTASI NON FISIK

Investasi non fisik tahun 2025 terealisasi sebesar Rp193,29 miliar, meningkat sebesar 12,49% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yang sebesar Rp171,84 miliar. Serapan investasi yang terbesar diantaranya:

1. Kantor Pusat - Pengembangan program strategis single ERP Pelindo Group terealisasi sebesar Rp91,7 miliar.
2. Kantor Pusat - Digitalisasi operasional terealisasi sebesar Rp30,6 miliar.

10. Regional 3 - Short Term Berlian Terminal East Pier Strengthening was realized at Rp40.5 billion.
11. Regional 3 - Strengthening the Kalimas Pier Structure was realized at Rp25 billion.
12. Regional 4 - Revitalization of the Pier and Repair of the Talud was realized at Rp3.5 billion.
13. Head Office - Realized interest capitalization was realized at Rp403.6 billion.

EQUIPMENT FACILITIES, INSTALLATION FACILITIES, EQUIPMENT AND SUPPLIES, VESSELS AND VEHICLES

Equipment facilities, installation facilities, equipment and supplies, vessels and vehicles in 2025 were realized at Rp314.18 billion, an increase of 40.46% compared to Rp223.68 billion realized in 2023. With the largest investment absorption by:

1. Head Office - Replacement of QCC 1,2,3 Panamax to QCC Super Post Panamax, procurement of 4 RTGC units, procurement of 1 reach stacker unit, procurement of 6 Terminal Tractor units and procurement of 6 chassis units realized at Rp215 billion.
2. Regional 1 - Container Crane Electrification at the Belawan Container Terminal realized at Rp14.6 billion.
3. Regional 2 - Procurement of Mobile Passenger Gangway Facilities at Tanjung Priok Port realized at Rp1.35 billion.
4. Regional 3 - Tanjung Perak Port Electrical Substation Rejuvenation realized amounting to Rp8.9 billion.

LAND AND LAND RIGHTS, AND EMPLACEMENTS

Land and land rights, and emplacements in 2025 were realized at Rp29.01 billion, a decrease of 51.99% compared to Rp60.44 billion in 2024, with investment absorption in 2024 included:

1. Head Office - Pelindo Land Certification realized at Rp36.2 billion.
2. Regional 2 - Lais River land development realized at Rp7.5 billion.
3. Flood Management Work at Tanjung Emas Port realized at Rp10.6 billion.
4. The work to build a perimeter fence on the HPL land boundary at Badas Port realized at Rp1.04 billion.

NON-PHYSICAL INVESTMENTS

Non-physical investment in 2025 was realized at Rp193.29 billion, an increase of 12.49% compared to Rp171.84 billion in 2024. The largest investment absorption included:

1. Head Office - Pelindo Group's single ERP strategic program development realized at Rp91.7 billion.
2. Head Office - Operational digitalization realized at Rp30.6 billion.

3. Kantor Pusat - Implementasi Data Management terealisasi sebesar Rp11,2 miliar.
4. Kantor Pusat - Pengembangan Aplikasi Layanan Bisnis (Front End) terealisasi sebesar Rp10,2 miliar.
5. Kantor Pusat - Implementasi Sistem Identify and Access Management (IAM) terealisasi sebesar Rp8,3 miliar.

INVESTASI ENTITAS ANAK

Investasi entitas anak tahun 2025 terealisasi sebesar Rp2,90 triliun, meningkat 132,85% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yang sebesar Rp1,25 triliun. Serapan investasi yang terbesar diantaranya oleh:

1. SPTP - Pengadaan CC di TPS terealisasi sebesar Rp328,6 miliar.
2. SPTP - Pembangunan Reklamasi Pulau Segitiga dan Fasilitas Penunjang terealisasi sebesar Rp237,1 miliar.
3. SPTP - Pengadaan 4 (empat) unit CC di TPK Semarang terealisasi sebesar Rp236,7 miliar.
4. SPTP - Pengadaan Alat B/M TPK Belawan terealisasi sebesar Rp198,7 miliar.
5. SPTP - Modernisasi Peralatan dan Perlengkapan B/M di PT TPS terealisasi sebesar Rp184,4 miliar.
6. SPTP - Pengadaan RMPC dan Alat Penunjang terealisasi sebesar Rp176,5 miliar .
7. SPTP - Pengadaan Alat B/M TPK Perawang terealisasi sebesar Rp140,6 miliar.
8. SPMT - Penyiapan fasilitas pemindahan Terminal LNG ke AP II BMTH terealisasi sebesar Rp84,9 miliar.
9. SPMT - Pemenuhan kebutuhan Gate dan PnC Transformasi pada Branch SPMT terealisasi sebesar Rp46,2 miliar.
10. SPMT - Pembangunan perpipaan BBM di area pengembangan 2 Pelabuhan Benoa terealisasi sebesar Rp44,9 miliar.
11. SMPT - Optimalisasi dan Pengembangan Peralatan Pelabuhan Terminal Curah Kering di PT Terminal Teluk Lamong terealisasi sebesar Rp20,9 miliar.
12. SPSL - Pengembangan Kawasan Industri Kuala Tanjung terealisasi sebesar Rp47,5 miliar.
13. SPSL - Pengadaan 4 (empat) unit Reach Stacker untuk Menunjang Kegiatan Bongkar Muat di Wilayah Kerja PT Multi Terminal Indonesia terealisasi sebesar Rp27,7 miliar.
14. SPSL - Pengembangan Hinterland Regional 1, 2 dan 3 terealisasi sebesar Rp26,2 miliar.
15. SPJM - Perawatan dan Perbaikan Armada Keruk terealisasi sebesar Rp6,9 miliar.
16. Pekerjaan Lanjutan Revitalisasi Jaringan Tegangan Menengah dan Tegangan Rendah di Pelabuhan Tanjung Priok terealisasi sebesar Rp4,7 miliar.
17. SPJM - Pekerjaan Perbaikan Fasilitas Galangan ex Rukindo terealisasi sebesar Rp5,2 miliar.
18. SPJM - Modifikasi Sistem Propulsi 2 (Dua) Unit Motor Pandu Cepat terealisasi sebesar Rp3,8 miliar.
19. SPJM - Penyempurnaan Aparat Keruk KK Bali II terealisasi sebesar Rp3,8 miliar.
20. ILCS - Pengembangan Produk Maritime Connect dan Pendukungnya terealisasi sebesar Rp3,1 miliar.

3. Head Office - Implementation of Data Management at Rp11.2 billion.
4. Head Office - Business Service Application Development (Front End) at Rp10.2 billion.
5. Head Office - Implementation of the Identify and Access Management (IAM) System at Rp8.3 billion.

SUBSIDIARY INVESTMENTS

Subsidiary investment in 2025 was realized at Rp2.90 trillion, an increase of 132.85% compared to Rp1.25 trillion in 2024. The largest investment absorptions included:

1. SPTP - CC procurement at TPS realized at Rp328.6 billion.
2. SPTP - Construction of the Triangle Island Reclamation and Supporting Facilities realized at Rp237.1 billion.
3. SPTP - Procurement of 4 (four) CC units at TPK Semarang realized at Rp236.7 billion.
4. SPTP - Procurement of TPK Belawan B/M Equipment realized at Rp198.7 billion.
5. SPTP - Modernization of B/M Equipment and Supplies at PT TPS realized at Rp184.4 billion.
6. SPTP - Procurement of RMPC and Supporting Equipment realized at Rp176.5 billion.
7. SPTP - Procurement of loading and unloading equipment for the Perawang Port Terminal (TPK Perawang) realized at Rp140.6 billion.
8. SPMT - Preparation of facilities for the transfer of the LNG Terminal to AP II BMTH realized at Rp84.9 billion.
9. SPMT - Fulfillment of Gate and PnC Transformation needs at the SPMT Branch realized at Rp46.2 billion.
10. SPMT - Construction of fuel pipelines in development area 2 of Benoa Port realized at Rp44.9 billion.
11. SMPT - Optimization and Development of Port Equipment for the Dry Bulk Terminal at PT Terminal Teluk Lamong realized at Rp20.9 billion.
12. SPSL - Development of the Kuala Tanjung Industrial Estate, realized at Rp47.5 billion.
13. SPSL - Procurement of 4 (four) Reach Stackers to Support Loading and Unloading Activities in the PT Multi Terminal Indonesia Work Area, realized at Rp27.7 billion.
14. SPSL - Development of Hinterland Regions 1, 2, and 3, realized at Rp26.2 billion.
15. SPJM - Maintenance and Repair of the Dredging Fleet, realized at Rp6.9 billion.
16. Continued Work on the Revitalization of the Medium and Low Voltage Networks at Tanjung Priok Port, realized at Rp4.7 billion.
17. SPJM - Repair Work on the Ex-Rukindo Shipyard Facilities, realized at Rp5.2 billion.
18. SPJM - Modification of the Propulsion System of 2 (Two) Fast Guide Motors, realized at Rp3.8 billion.
19. SPJM - Improvement of the Bali II KK Dredging Equipment, realized at Rp3.8 billion.
20. ILCS - Development of Maritime Connect and Supporting Products, realized at Rp3.1 billion.

21. PHCM - Peningkatan Peralatan Medis dan Fasilitas Rumah Sakit terealisasi sebesar Rp918 juta.
22. PMLI - Pengadaan Kendaraan Golfcart 6 Seater terealisasi sebesar Rp292 juta.
23. EDII - *Development Platform* RPA terealisasi sebesar Rp558 juta.

TUJUAN INVESTASI BARANG MODAL

Dari arahan strategis dan juga inisiatif strategis yang telah disusun, Pelindo melakukan kegiatan investasi guna meningkatkan kapasitas infrastruktur, suprastruktur dan fasilitas pendukung pelabuhan dalam menunjang kegiatan operasional maupun melakukan pengembangan usaha. Investasi yang dilakukan Perseroan dikelompokkan menjadi investasi strategis termasuk proyek strategis nasional dan investasi non strategis yang merupakan investasi rutin (*business as usual*). Investasi yang dilakukan bertujuan menghasilkan pendapatan *(generating revenue)*, memenuhi *minimal requirement*, meningkatkan keamanan dan keselamatan kerja *(level of safety),* serta mendukung tujuan administratif *(level of service).* Investasi yang akan diprioritaskan yaitu pada penyelesaian pembangunan Proyek Strategis Perseroan yang telah memiliki *captive market* besar dan berkelanjutan.

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Sampai dengan akhir Laporan Tahunan disusun tidak terdapat uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang.

PROSPEK USAHA DAN STRATEGI KE DEPAN TAHUN 2026

Pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2026 diproyeksikan mengalami perlambatan moderat dengan tingkat pertumbuhan sekitar 3,1% menurut International Monetary Fund, yang mencerminkan masih tingginya ketidakpastian geopolitik di berbagai kawasan, berlanjutnya tekanan inflasi global, serta dampak pengetatan kebijakan moneter di sejumlah negara maju. Kondisi tersebut mendorong peningkatan biaya pembiayaan, melemahnya aktivitas investasi, serta perlambatan permintaan global, yang pada akhirnya berdampak pada terbatasnya ekspansi perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi dunia secara keseluruhan. Dalam jangka menengah, dinamika ini berpotensi meningkatkan volatilitas pasar keuangan global serta menekan arus investasi lintas negara, khususnya ke negara berkembang, sekaligus memengaruhi stabilitas harga komoditas dan kinerja ekspor negara-negara berbasis komoditas. Oleh karena itu, prospek ekonomi global pada tahun 2026 tetap memerlukan kewaspadaan tinggi terhadap berbagai risiko eksternal yang dapat memengaruhi kesinambungan pertumbuhan ekonomi dunia.

21. PHCM - Improvement of Medical Equipment and Hospital Facilities, realized at Rp918 million.
22. PMLI - Procurement of 6-Seater Golf Carts, realized at Rp292 million.
23. EDII - Development of the RPA Platform, realized at Rp558 million.

PURPOSE OF CAPITAL GOODS INVESTMENTS

From the prepared strategic directives and initiatives, Pelindo carries out investment activities to increase the capacity of its infrastructure, superstructure and supporting port facilities to support operational activities and carry out business development. Investments made by the Company are grouped into strategic investments including national strategic projects and non-strategic investments, which are routine investments (business as usual). The investments made aim to generate revenue, meet minimum requirements, improve work safety and security (level of safety), and support administrative objectives (level of service). The investments to be prioritized are for completing the construction of the Company's Strategic Projects that already have a large and sustainable captive market.

MATERIAL INFORMATION AND FACTS AFTER THE DATE OF THE ACCOUNTANT'S REPORT

Up until this Annual Report was completed, no important events after the date of the accountant's report occurred, so there is no information to report on their impact on future business performance and risks.

BUSINESS PROSPECTS AND FUTURE STRATEGIES IN 2026

Global economic growth in 2026 is projected to ssee a moderate slowdown, with a growth rate of around 3.1%, according to the International Monetary Fund, reflecting persistently high geopolitical uncertainty in many regions, continued global inflationary pressures, and the impact of monetary policies tightening in several developed countries. These conditions have led to increased financing costs, weakened investment activity, and slowed global demand, ultimately limiting the expansion of international trade and overall global economic growth. In the medium term, these dynamics could potentially increase global financial market volatility and suppress cross-border investment flows, particularly to developing countries, while also impacting commodity price stability and the export performance of commodity-based countries. Therefore, the global economic outlook for 2026 requires continued vigilance against external risks that could impact global economic growth sustainability.

Di tengah dinamika ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian tersebut, prospek perekonomian Indonesia pada tahun 2026 tetap menunjukkan arah yang positif dengan mengandalkan kekuatan permintaan domestik sebagai penopang utama pertumbuhan. Pemerintah Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2026 berada pada kisaran 5,2%–5,8%, sebagaimana ditetapkan dalam asumsi dasar ekonomi makro oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai landasan penyusunan RAPBN 2026. Proyeksi tersebut mencerminkan optimisme terhadap ketahanan ekonomi nasional dalam merespons tekanan eksternal. Sementara itu, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menetapkan target pertumbuhan yang lebih optimistis dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026, yaitu pada kisaran 5,8%–6,3%, sebagai bagian dari strategi percepatan transformasi ekonomi dan peningkatan produktivitas sektor-sektor strategis.

Despite these uncertain global economic dynamics, Indonesia's economic outlook for 2026 remains positive, relying on strong domestic demand as the primary driver of growth. The Indonesian government projects national economic growth in 2026 to be in the range of 5.2%–5.8%, as stipulated in the basic macroeconomic assumptions set by the Republic of Indonesia Ministry of Finance as the basis for preparing the 2026 Draft State Budget (RAPBN). This projection reflects optimism regarding the resilience of the national economy in responding to external pressures. While, the Ministry of National Development Planning/Bappenas has set a more optimistic growth target in their 2026 Government Work Plan (RKP), in the range of 5.8%–6.3%, as part of its strategy to accelerate economic transformation and increase productivity in strategic sectors.

Untuk mencapai target tersebut, pertumbuhan ekonomi tahun 2026 diperkirakan akan didukung oleh penguatan konsumsi domestik, peningkatan investasi, serta belanja pemerintah yang difokuskan pada sektor prioritas seperti infrastruktur, ketahanan pangan, energi, dan industri pengolahan. Namun demikian, pencapaian target pertumbuhan tersebut tetap menghadapi tantangan, baik yang bersumber dari faktor eksternal maupun domestik, antara lain ketidakpastian ekonomi global, volatilitas pasar keuangan, serta kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin besar. Dengan demikian, sinergi antara kebijakan fiskal, pembangunan nasional, dan penguatan sektor produktif domestik menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan pada tahun 2026

To achieve this target, economic growth in 2026 is expected to be supported by strengthening domestic consumption, increased investment, and government spending focused on priority sectors such as infrastructure, food security, energy, and the manufacturing industry. However, achieving this growth target still faces challenges, stemming from both external and domestic factors, including global economic uncertainty, financial market volatility, and the growing need for development financing. Therefore, synergy between fiscal policy, national development, and strengthening the domestic productive sector will be key factors in maintaining economic stability and ensuring sustainable economic growth in 2026.

Sumber:
1. *World Economic Outlook,* International Monetary Fund (IMF), April 2026
2. Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2026, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
3. Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
4. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas.

Sources:
1. World Economic Outlook, International Monetary Fund (IMF), April 2026
2. Macroeconomic Framework and Fiscal Policy Principles (KEM-PPKF) 2026, Republic of Indonesia Ministry of Finance.
3. Financial Note and Draft State Budget (RAPBN) for Fiscal Year 2026, Republic of Indonesia Ministry of Finance.
4. Government Work Plan (RKP) 2026, Ministry of National Development Planning/Bappenas.

Sejalan dengan proyeksi perekonomian global dan nasional yang masih menghadapi berbagai tantangan dan peluang pertumbuhan, sektor kepelabuhanan dan logistik diperkirakan akan terus beradaptasi terhadap perubahan dinamika perdagangan dan arus distribusi barang. Saat ini, terdapat sejumlah tren di industri kepelabuhanan dan logistik di dunia, antara lain sebagai berikut:

In line with global and national economic projections that continue to face challenges and growth opportunities, the port and logistics sector is expected to continue adapting to changing trade dynamics and goods distribution flows. Currently, there are several trends in the global port and logistics industry, including the following:

1. **Global/Regional Coverage**
   Global/*Regional Coverage* merupakan strategi yang dilakukan oleh operator pelabuhan untuk memperluas cakupan bisnis secara geografis pada tingkat regional maupun global. Strategi ini bertujuan untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya, meningkatkan efisiensi operasional, serta mengurangi tingkat persaingan antar pelabuhan melalui pengelolaan jaringan pelabuhan yang lebih terintegrasi melalui strategi horizontal integration, yaitu integrasi antarpelabuhan atau terminal yang berada pada tingkat rantai nilai yang sama. Integrasi ini dapat dilakukan melalui pembentukan operator pelabuhan regional maupun penggabungan dan akuisisi pelabuhan untuk memperkuat jaringan terminal pada wilayah geografis tertentu.
2. ***Industrial Zone Integration***
   Selain melakukan *horizontal integration,* otoritas pelabuhan dan operator terminal di dunia juga mulai mengadopsi strategi *vertival integration* yaitu integrasi pelabuhan dengan (i) layanan logistik dan depo petikemas, (ii) sistem transportasi multimoda, dan kawasan hinterland (yang dikembangkan menjadi kawasan industri atau kawasan ekonomi) untuk mengembangkan bisnisnya.
3. ***Pursue Operational Excellence***
   Selain ekspansi jaringan dan integrasi ekosistem logistik, operator terminal global secara konsisten menerapkan strategi pursue *operational excellence* untuk meningkatkan daya saing pelabuhan dalam jaringan logistik internasional. Strategi ini berfokus pada peningkatan produktivitas terminal, optimalisasi pemanfaatan aset, digitalisasi proses operasional, serta integrasi sistem operasional pelabuhan secara menyeluruh. Dalam industri pelabuhan yang semakin kompetitif, kemampuan untuk mengelola operasi secara efisien menjadi faktor kunci dalam menarik layanan pelayaran global, meningkatkan *throughput*, serta memperkuat posisi pelabuhan dalam jaringan perdagangan internasional. Untuk mencapai tingkat efisiensi operasional yang lebih tinggi, banyak operator pelabuhan global juga mengadopsi konsep *smart ports*, yaitu pemanfaatan teknologi digital dan sistem berbasis data untuk meningkatkan efisiensi operasional, keamanan, dan keberlanjutan operasional pelabuhan. Implementasi *smart port* umumnya didukung oleh teknologi seperti *Internet of Things* (IoT), *data analytics,* serta *integrated digital systems* yang memungkinkan pertukaran data secara *real-time* antar berbagai sistem operasional pelabuhan. Sejalan dengan tren global tersebut, Pelindo juga telah mengembangkan berbagai inisiatif digitalisasi operasional melalui implementasi sistem *planning and control* yang terintegrasi di seluruh rantai operasional pelabuhan, mencakup *land side, sea side,* dan *yard side operations*. Integrasi sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat proses bongkar muat, serta meningkatkan transparansi dan visibilitas operasional Pelabuhan.

1. Global/Regional Coverage
   Global/Regional Coverage is a strategy followed by port operators to expand their business geographically at the regional and global levels. This strategy aims to optimize resource allocation, improve operational efficiency, and reduce competition between ports through a more integrated port network management through a horizontal integration strategy, for integration between ports or terminals at the same level of the value chain. This integration can be achieved by establishing regional port operators or port mergers and acquisitions to strengthen terminal networks in specific geographic areas.

2. Industrial Zone Integration
   In addition to horizontal integration, port authorities and terminal operators worldwide have also begun adopting a vertical integration strategy by integrating ports with (i) logistics services and container depots, (ii) multimodal transportation systems, and hinterland areas (developed into industrial or economic zones) to expand their businesses.

3. Pursue Operational Excellence
   In addition to network expansion and logistics ecosystem integration, global terminal operators consistently implement a strategy of pursuing operational excellence to improve port competitiveness within the international logistics network. This strategy focuses on increasing terminal productivity, optimizing asset utilization, digitizing operational processes, and integrating port operational systems comprehensively. In an increasingly competitive port industry, the ability to manage operations efficiently is a key factor in attracting global shipping services, increasing throughput, and strengthening a port's position in the international trade network. To achieve higher levels of operational efficiency, many global port operators are also adopting the concept of smart ports, using digital technology and data-driven systems to improve operational efficiency, security, and sustainability. Smart port is generally supported by technologies such as the Internet of Things (IoT), data analytics, and integrated digital systems that enable real-time data exchange between port operational systems. In line with this global trend, Pelindo has also developed operational digitalization initiatives by implementing integrated planning and control systems across the entire port operational chain, covering the landside, seaside, and yardside operations. This system integration looks to improve operational efficiencies, accelerate loading and unloading processes, and enhance transparency and visibility of port operations.

Gambar Megatren Industri Kepelabuhan dan Logistik Global
Megatrends in the Global Port and Logistics Industry

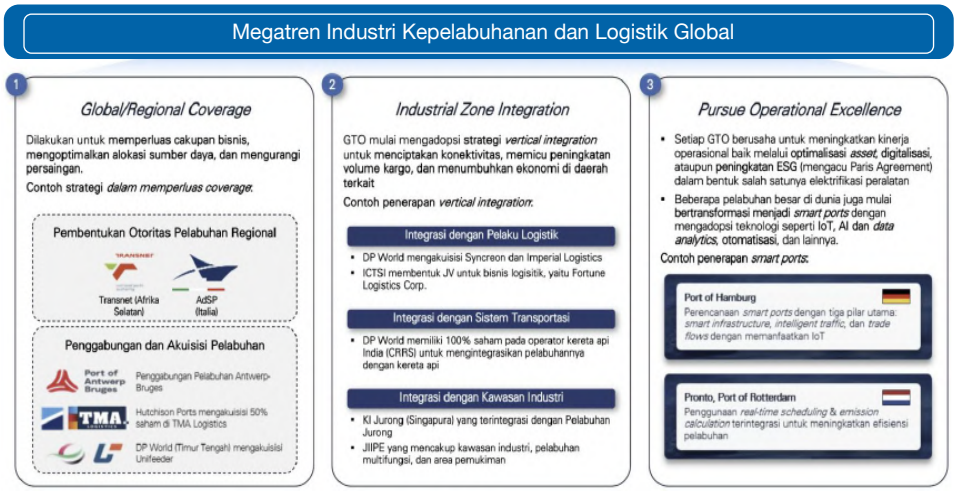

Sumber: Analisa Konsultan SKHA (2026) dan Analisa Internal Pelindo dalam RJPP 2026-2030
Source: SKHA Consultant Analysis (2026) and Pelindo's Internal Analysis in the 2026–2030 Long-Term Strategic Plan

Untuk menghadapi tahun 2026, Pelindo melakukan analisis secara internal untuk mengidentifikasi peluang-peluang usaha yang dapat dicapai dengan berbekal keunggulan yang dimiliki. Pelindo memiliki beberapa kekuatan internal yang dapat dijadikan landasan untuk mengembangkan bisnis pelabuhan di Indonesia, seperti portofolio yang terdiversifikasi, menguasai pasar petikemas di Indonesia, dan memiliki lokasi yang strategis untuk dijadikan transshipment hub. Namun, untuk dapat melakukan perencanaan strategi dan mencapai sasaran Pelindo tahun 2026-2030, Perseroan tidak cukup mengandalkan kekuatan internalnya saja tetapi juga mengkalkulasi faktor eksternal yang menjadi ancaman sekaligus peluang yang dapat dioptimalkan guna keberlangsungan Perseroan, sehingga perlu dilakukan Analisis Lingkungan Bisnis Perseroan dengan menggunakan *framework Strengths Weaknesses Opportunities Threats* (SWOT). Analisis SWOT adalah bagian integral setiap proses perencanaan strategis dalam menangkap potensi dan memetakan hambatan yang ada. Analisis mencakup lingkungan internal Perseroan yang akan menghasilkan *strengths* (kekuatan) dan *weaknesses* (kelemahan), sedangkan analisis eksternal akan menghasilkan *opportunities* (peluang) dan *threats* (ancaman).

To prepare for 2026, Pelindo carried out an internal analysis to identify potential business opportunities leveraging its existing strengths. Pelindo has many internal strengths that can serve as a foundation for developing its port business in Indonesia, such as its diversified portfolio, dominance of the Indonesian container market, and a strategic location for transshipment hubs. However, to strategically plan and achieve Pelindo's 2026-2030 targets, the Company must not rely solely on its internal strengths but also consider external factors that pose both threats and opportunities that can be optimized for the Company's sustainability. Therefore, a Business Environment Analysis using the Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats (SWOT) framework is necessary. A SWOT analysis is an integral part of every strategic planning process, capturing potential and identifying existing obstacles. The analysis covers the Company's internal environment, which will identify strengths and weaknesses, while the external analysis will identify opportunities and threats.

Tabel Analisis SWOT Pelindo
Pelindo SWOT Analysis Table

Strengths (S)	Weaknesses (W)
1. Memiliki wilayah cakupan layanan yang luas dan tersebar di seluruh Indonesia. 2. Layanan kepelabuhanan yang terdiversifikasi dan saling melengkapi. a. Lini bisnis kepelabuhanan yang lengkap, terdiri dari 4 (empat) Subholding yaitu: (1) Petikemas, (2) Non Petikemas, (3) *Logistik and Hinterland Development*, serta (4) *Marine, Equipment and Port Services*. b. Pelindo memiliki portofolio bisnis yang beragam, baik yang bersifat *port-related* maupun *non-port related*. 3. Saat ini, pangsa pasar Pelindo di pasar petikemas adalah 98%. Pelabuhan petikemas dengan *throughput* tertinggi di Indonesia yaitu Tanjung Priok dan Tanjung Perak. 4. Memiliki lokasi yang strategis untuk dijadikan *transshipment hub,* yaitu Pelabuhan Kuala Tanjung dan Pelabuhan Belawan yang terletak di rute perdagangan utama antara Asia dan Eropa 5. Masing-masing Subholding telah memiliki sistem digital yang terintegrasi untuk memberikan kemudahan layanan kepelabuhanan kepada *customer* secara *seamless* (TOS Nusantara dan Palapa untuk bisnis Petikemas, PTOS-M untuk bisnis nonpetikemas, YOS dan BOS untuk bisnis logistik, dan Phinisi untuk bisnis layanan kapal) 6. Berpengalaman dalam pelaksanaan aktivitas kepelabuhanan.	1. Penguasaan pangsa pasar nonpetikemas masih rendah (11%) jika dibandingkan dengan *player* BUMN dan swasta lainnya yang dapat mengoperasikan TUKS/Tersus 2. Kompetensi SDM yang masih belum merata akibat pemenuhan sertifikasi SDM yang masih rendah dan belum adanya indikator dan program SDM yang memenuhi kompetensi skala global. 3. Struktur organisasi yang belum agile dan adaptif pada perubahan model bisnis baru sehingga sulit untuk bersaing dengan kompetitor swasta. 4. Kesenjangan dalam proses standardisasi bisnis antar pelabuhan akibat ketersediaan aset dan penetrasi sistem layanan digital yang belum merata. 5. Pengembangan layanan di segmen logistik, *hinterland*, dan properti yang belum berkembang. 6. Adanya kebutuhan biaya tambahan yang diperlukan untuk proses harmonisasi SDM dan pemurnian bisnis pasca penggabungan Pelindo. 7. Profitabilitas Pelindo yang masih rendah (11%) jika dibandingkan dengan global *port operator* (>20%).
1. Has a broad service coverage area throughout Indonesia. 2. Diversified and complementary port services. a. Complete port business lines, consisting of four subholdings: (1) Container, (2) Non-Container, (3) Logistics and Hinterland Development, and (4) Marine, Equipment and Port Services. b. Pelindo has a diverse business portfolio, both port-related and non-port-related. 3. Currently, Pelindo's market share in the container market is 98%. The container ports with the highest throughput in Indonesia are Tanjung Priok and Tanjung Perak. 4. Strategically located as transshipment hubs, Kuala Tanjung Port and Belawan Port, which are located on major trade routes between Asia and Europe. 5. Each subholding has an integrated digital system to provide seamless port services to customers (TOS Nusantara and Palapa for container businesses, PTOS-M for non-container businesses, YOS and BOS for logistics businesses, and Phinisi for ship services). 6. Experienced in implementing port activities.	1. The non-container market share remains low (11%) compared to other state-owned and private companies that can operate TUKS/Tersus. 2. Unequal human resource competency due to low levels of human resource certification and the absence of indicators and programs that meet global competency standards. 3. The organizational structure is not yet agile and adaptable to new business models, making it difficult to compete with private competitors. 4. Gaps in business standardization processes between ports due to uneven asset availability and digital service system penetration. 5. Underdeveloped service development in the logistics, hinterland, and property segments. 6. Additional costs required for human resource harmonization and business refinement following the Pelindo merger. 7. Pelindo's profitability remains low (11%) compared to global port operators (>20%).

Tabel Analisis SWOT Pelindo
Pelindo SWOT Analysis Table

Opportunities (O)	Threats (T)
1. Program Pemerintah yang sejalan dengan peningkatan konektivitas logistik. a. Terdapat 211 proyek strategis nasional yang didalamnya mencakup pengembangan sektor pelabuhan dan kawasan yang bertujuan untuk menurunkan biaya logistik b. Adanya peraturan hilirisasi industri berdasarkan UU No. 3 tahun 2020 2. Pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan mencapai angka 5,6%-6,1% hingga tahun 2029. 3. Terdapat potensi penguatan layanan kepelabuhanan yang terintegrasi melalui sinergi dengan klaster BUMN logistik. 4. Terdapat potensi perluasan jaringan baru layanan petikemas ke wilayah Asia yang telah menguasai 55% *market share* petikemas global. 5. Potensi kerjasama dengan mitra usaha strategis nasional dan global dalam penyediaan layanan kepelabuhanan.	1. Kondisi geopolitik global yang berdampak pada ketidakpastian perekonomian 2. *Low entry barriers* dalam bisnis kepelabuhanan 3. Pelaku usaha dapat mengembangkan bisnis layanan kepelabuhanan di wilayah Pelindo (kapal, bongkar muat nonpetikemas) 4. Pelaku industri dan Pemerintah Daerah dapat mengoperasikan pelabuhan sendiri dengan proses perizinan yang mudah dan cepat dan dapat bekerjasama dengan operator pelabuhan global. 5. Proyeksi pertumbuhan bisnis petikemas dan nonpetikemas yang stagnan baik global maupun nasional. 6. Pertumbuhan industri yang belum merata terutama di daerah Timur sehingga berdampak pada *cargo imbalance.* 7. Moda transportasi yang belum terkoneksi antara darat, laut, dan udara sehingga konektivitas antar wilayah masih rendah.
1. Government programs aligned with improving logistics connectivity. a. 211 national strategic projects, including the development of the port sector and regions aimed at reducing logistics costs. b. Regulations on industrial downstreaming based on Law No. 3 of 2020. 2. National economic growth targeted to reach 5.6%-6.1% by 2029. 3. Potential for strengthening integrated port services through synergy with state-owned logistics clusters. 4. Potential for expanding new container service networks to the Asian region, which already controls 55% of the global container market share. 5. Potential for collaboration with national and global strategic business partners in the provision of port services.	1. Global geopolitical conditions impacting economic uncertainty 2. Low entry barriers in the port business 3. Businesses can develop port service businesses within the Pelindo (ship, non-container loading and unloading) region. 4. Industry players and regional governments can operate their own ports with a simple and fast licensing process and can collaborate with global port operators. 5. Projected stagnant growth in the container and non-container business, both globally and nationally. 6. Uneven industrial growth, especially in the eastern region, impacting cargo imbalance. 7. Unconnected transportation modes between land, sea, and air, resulting in low connectivity between regions. pp

Sumber: Buku Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2025-2029
Source: 2025-2029 Company Long-Term Plan (RJPP)

Berdasarkan komponen-komponen SWOT yang telah dijelaskan di atas, dibuat penilaian dan pemetaan pada matriks empat kuadran SWOT. Berdasarkan pemetaan, posisi Pelindo berada pada kuadran O-S. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kondisi internal yang kuat didukung dengan telah terjadinya proses pengalihan bisnis, proses inbreng saham, dan proses pemurnian bisnis pasca penggabungan Pelindo yang berdampak pada penguatan internal perusahaan menjadi lebih *agile*. Ke depannya, Pelindo perlu mengadopsi pengembangan bisnis yang lebih agresif dengan memanfaatkan *opportunity* yang ada untuk semakin memperkuat posisi SWOT Perseroan dengan penilaian yang lebih tinggi.

Based on the SWOT components described above, an assessment and mapping was made using a four-quadrant SWOT matrix. Based on this mapping, Pelindo's position is in the O-S quadrant, indicating that the Company has strong internal conditions, supported by the business transfer processes, share inbreng process, and business refinement process after the Pelindo merger, which has resulted in strengthening the Company's internal capabilities and making it more agile. Moving forward, Pelindo needs to adopt a more aggressive business development strategy by capitalizing on existing opportunities to further strengthen the Company's SWOT position with a higher assessment.

Gambar Pembobotan dan Penilaian SWOT
SWOT Weighting and Assessment

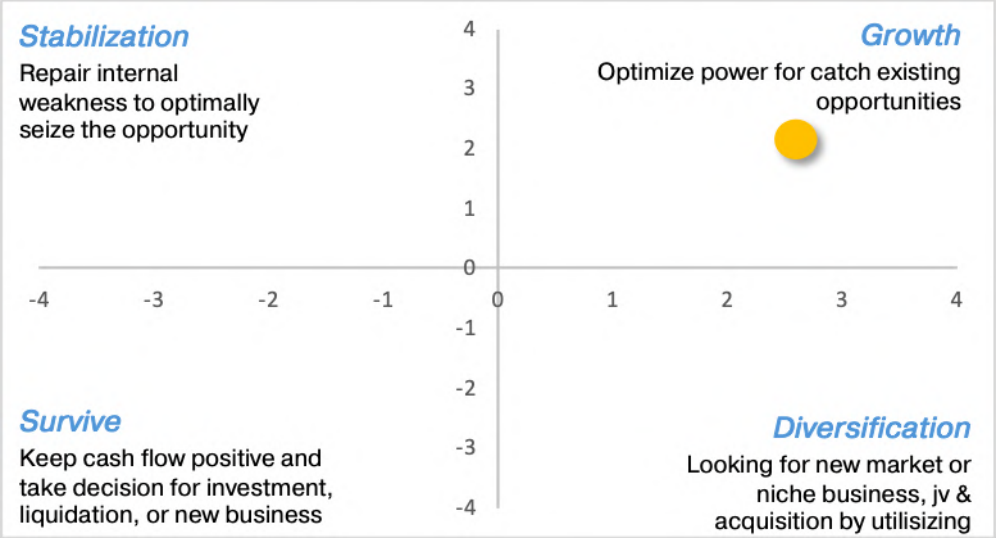

Sumber: Buku Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2025-2029
Source: 2025-2029 Company Long-Term Plan (RJPP)

Pelindo menilai bahwa kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*) yang dimiliki melampaui kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*) yang dihadapi. Hal ini memberikan dasar yang kuat bagi Perseroan untuk terus mengembangkan bisnis dan meningkatkan kinerja operasional maupun finansial secara berkelanjutan. Optimisme tersebut tercermin dalam komitmen Perseroan untuk menjaga pertumbuhan yang sehat dalam jangka pendek, sekaligus memperkuat fondasi usaha guna meraih keberhasilan jangka panjang. Dengan demikian, Perseroan memiliki prospek usaha yang baik, yang semakin diperkuat oleh berbagai keunggulan internal yang dimiliki.

Pelindo assessment showed that its strengths and opportunities outweigh the weaknesses and threats it faces. This provides a strong foundation for the Company to continue developing its business and sustainably improving its operational and financial performance. This optimism is reflected in the Company's commitment to maintaining healthy short-term growth while strengthening its business foundations for long-term success. Consequently, the Company has positive business prospects, further strengthened by its internal strengths.

Prospek usaha yang baik tersebut tidak terlepas dari dukungan berbagai keunggulan internal, seperti struktur organisasi yang efisien, penguasaan pasar domestik, kapabilitas sumber daya manusia, serta dukungan teknologi dan sistem logistik yang terus berkembang. Dengan kombinasi antara potensi internal dan peluang eksternal yang dimiliki, Perseroan berada dalam posisi yang strategis untuk merespon dinamika industri dan mewujudkan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

These positive business prospects are inextricably linked to internal strengths, such as an efficient organizational structure, domestic market dominance, human resource capabilities, and continuously evolving technology and logistics systems. With this combination of internal potential and external opportunities, the Company is strategically positioned to respond to industry dynamics and achieve sustainable business growth.

Sejalan dengan posisi strategis tersebut, pada tahun 2026 Perseroan memasuki tahap "Integrated Connectivity" yang ditujukan untuk memperkuat peran Perseroan dalam mendukung akselerasi konektivitas nasional, baik melalui integrasi pelabuhan dengan kawasan industri maupun integrasi sistem. Implementasi integrasi konektivitas tersebut akan difokuskan pada:

1. Pengembangan konektivitas multimoda dan integrasi *hinterland*.
2. Kolaborasi untuk pengembangan *port-led integration* logistic.
3. Kolaborasi dengan *cargo owner* dan pelaku industri untuk distribusi barang secara *end-to-end* dengan memanfaatkan digital platform.

In line with this strategic position, in 2026 the Company will enter the "Integrated Connectivity" phase, aimed at strengthening the Company's role in supporting the acceleration of national connectivity, both through the integration of ports with industrial zones and through system integration. The implementation of this connectivity integration will focus on:

1. The development of multimodal connectivity and hinterland integration.
2. Collaboration for the development of port-led integrated logistics.
3. Collaboration with cargo owners and industry players for end-to-end goods distribution utilizing digital platforms.

4. Pengembangan dan implementasi port ecosystem *connectivity hub*.
5. Peningkatan layanan operasional secara holistik melalui peningkatan kehandalan peralatan pelabuhan serta integrasi standarisasi dan digitalisasi/sistematisasi.

4. Development and implementation of a port ecosystem connectivity hub.
5. Holistic improvement of operational services through enhanced reliability of port equipment as well as the integration of standardization and digitization/ systematization.

PENCAPAIAN TARGET DAN TARGET KE DEPAN

ACHIEVEMENT OF TARGETS AND FUTURE TARGETS

PENCAPAIAN TARGET

TARGET ACHIEVEMENT

PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI PRODUKSI

Uraian atas perbandingan target dan realisasi produksi arus trafik operasi kepelabuhan tahun 2025 adalah sebagai berikut.

COMPARISON OF PRODUCTION TARGETS AND REALIZATION

A comparison of the targets and actual production of port operations traffic in 2023 is as follows.

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Arus Trafik
Comparison of Target and Actual Traffic Flow

Jenis Kegiatan Type of Activity	Satuan Unit	RKAP 2025 2025 RKAP	Realisasi 2025 2025 Realization	Pencapaian Achievement (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)*100
Arus Kapal Ship Traffic	Unit	329.951	369.813	112,08%
	GT	1.418.693.782	1.422.887.719	100,30%
Arus Petikemas Container Traffic	Box	14.328.944	14.875.783	103,82%
	TEUs	18.809.458	19.785.539	105,19%
Arus Barang Non Petikemas Non-Container Traffic	Ton	191.308.318	195.168.554	102,02%
	M3	7.004.316	6.461.240	92,25%
	Unit	2.853.324	3.069.156	107,56%
	MMBTU	13.445.033	15.943.575	118,58%
	Ekor Heads Heads	645.277	787.682	122,07%
Arus Penumpang Passenger Traffic	Orang People	19.807.428	20.434.569	103,17%

Capaian arus kapal dalam satuan Unit tahun 2025 mencapai 112,08% dari target RKAP. Sedangkan untuk satuan GT tercapai target RKAP yakni sebesar 100,30%. Hal ini disebabkan tercapainya trafik kapal bermuatan batubara pada lokasi Tersus dan *Ship to Ship* (STS) di Balikpapan dan Samarinda, serta adanya kerjasama di Pekanbaru untuk layanan pemanduan kapal di wilayah Jembatan Siak dan di Tersus Futong. Ketercapaian arus juga sebagai dampak adanya kunjungan kapal petikemas di Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Tanjung Emas akibat adanya *extra call* maupun penambahan rute dari perusahaan pelayaran.

The 2025 ship traffic target, per unit, reached 112.08% of the RKAP (Work Plan and Budget) target. While, the GT target of 100.30% was achieved due to the increased traffic of coal-laden vessels at the Tersus and Ship-to-Ship (STS) locations in Balikpapan and Samarinda, as well as cooperation in Pekanbaru for ship pilotage services in the Siak Bridge area and at Tersus Futong. The traffic achieved was also due to the increased calls of container ships at Tanjung Priok, Tanjung Perak, and Tanjung Emas due to extra calls and additional routes from shipping companies.

Arus petikemas dalam satuan Box secara RKAP 2025 tercapai sebesar 103,82% sedangkan dalam satuan TEUs tercapai 105,19%. Ketercapaian trafik petikemas tahun 2025 dipengaruhi adanya *extra call* maupun penambahan rute kapal petikemas di Tanjung Priok, Tanjung Perak dan Tanjung Emas.

The 2025 Work Plan and Budget (RKAP) achieved 103.82% of the container traffic in box units, while the TEU traffic reached 105.19%. This achievement in container traffic in 2025 was due to extra calls and additional container ship routes at Tanjung Priok, Tanjung Perak, and Tanjung Emas.

Arus barang non petikemas dalam satuan Ton tahun 2025 mencapai 102,02% di atas target RKAP. Hal ini dipengaruhi akibat terpenuhinya target arus barang komoditas batubara di Cabang Balikpapan, *steel product* dan CPO di Tanjung Priok, serta LPG dan pasir kuarsa di Tanjung Emas.

The non-container goods traffic in tons in 2025 reached 102.02%, above the RKAP target. This was due to achieving the targeted traffic for coal commodities at the Balikpapan Branch, steel products and CPO at Tanjung Priok, and LPG and quartz sand at Tanjung Emas.

Arus barang non petikemas satuan M3 hanya 92,25%, yang berada di atas target RKAP. Hal ini rendahnya realisasi kegiatan ekspor kargo *windmill tower* di Banten dan telah selesainya pembangunan smelter di Gresik dan beberapa pabrik di Batang yang distribusi barangnya melalui Tanjung Emas.

The non-container goods traffic in cubic meters (M3) was only 92.25%, above the RKAP target. This was due to the low realization of windmill tower cargo exports in Banten and the completion of the smelter construction in Gresik and several factories in Batang, where goods are distributed through Tanjung Emas.

Arus barang non petikemas dalam satuan Unit berhasil melampaui target RKAP yang mencapai 107,56%. Ketercapaian ini disebabkan adanya bongkar muat mobil CBU di Tanjung Priok, Pontianak, dan Makassar. Selain itu, layanan kapal *Roll-on/Roll-off* (RoRo) mengalami pertumbuhan yang signifikan di pelabuhan, antara lain Tanjung Perak, Lembar, Tanjung Wangi, dan Tenau Kupang.

The non-containerized goods traffic, per unit, exceeded the RKAP target by 107.56%, due to the loading and unloading of CBU vehicles at Tanjung Priok, Pontianak, and Makassar. Furthermore, Roll-on/Roll-off (RoRo) ship services experienced significant growth at ports including Tanjung Perak, Lembar, Tanjung Wangi, and Tenau Kupang.

Arus barang non petikemas satuan MMBTU terealisasi 15.943.575 MMBTU atau 118,58% dari anggaran tahun 2025 dikarenakan telah terpenuhinya permintaan energi terutama untuk mendukung pertumbuhan sektor pariwisata di Pulau Bali serta kebutuhan operasional sektor industri dan transportasi.

The non-containerized goods traffic, per unit (MMBTU), reached 15,943,575 MMBTU, or 118.58% of the 2025 budget, due to the fulfillment of energy demand, particularly to support the growth of the tourism sector on the island of Bali, as well as the operational needs of the industrial and transportation sectors.

Arus hewan terealisasi 787.682 Ekor atau 122,07% bila dibandingkan anggaran tahun 2025 Ketercapaian ini didukung oleh kebijakan pemerintah dalam mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan swasembada daging/susu melalui impor sapi di Pelabuhan Tanjung Priok dari Australia, Brasil dan Amerika Serikat. Selain itu, ketercapaian tersebut juga disebabkan karena tingginya permintaan pada momentum keagamaan (Idul Adha) yang terjadi di Trisakti dan Kupang.

Animal traffic reached 787,682, or 122.07% of the 2025 budget, supported by government policies for the Free Nutritious Meals (MBG) program and meat/milk self-sufficiency through cattle imports at Tanjung Priok Port from Australia, Brazil, and the United States. This achievement was also due to high demand during the religious holiday (Eid al-Adha) at Trisakti and Kupang.

Arus penumpang terealisasi 20.434.569 Orang atau 103,17% bila dibandingkan dengan anggaran tahun 2025. Ketercapaian dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi di sektor pariwisata internasional dan domestik khususnya di wilayah timur Indonesia serta peningkatan jumlah wisatawan asing melalui kapal cruise.

Passenger traffic reached 20,434,569, or 103.17% of the 2025 budget, due to economic activities in the international and domestic tourism sectors, particularly in eastern Indonesia, as well as an increase in the number of foreign tourists via cruise ships.

PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KEUANGAN

Uraian atas realisasi perbandingan target dan realisasi laporan posisi keuangan konsolidasian tahun 2025 adalah sebagai berikut.

COMPARISON OF FINANCIAL TARGET AND REALIZATION

The following is a description of the comparison of targets and realizations in the 2025 consolidated statement of financial position.

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
Comparison of the Consolidated Statement of Financial Position Targets and Realization

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	RKAP 2025 2025 RKAP	Realisasi 2025 2025 Realization	Pencapaian Achievement
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)*100
ASET ASSETS			
Aset lancar Current Assets	**18.782.532**	21.449.869	114,20%
Aset tidak lancar Non-Current Assets	**103.566.354**	104.604.937	101,00%
Total aset Total Assets	**122.348.886**	126.054.806	103,03%
LIABILITAS LIABILITIES			
Liabilitas jangka pendek Short-Term Liabilities	**13.988.484**	18.891.313	135,05%
Liabilitas jangka panjang Non-Current Liabilities	**55.445.894**	56.805.889	102,45%
Total liabilitas Total Liabilities	**69.434.377**	75.697.202	109,02%
EKUITAS EQUITY			
Ekuitas Equity	**52.914.508**	50.357.604	95,17%

Aset Pelindo menunjukkan kinerja yang melampaui target, dengan total realisasi mencapai Rp126,05 triliun atau 103,03% dari RKAP 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh pencapaian aset lancar sebesar 114,20% dan aset tidak lancar sebesar 101,00%. Di sisi lain, liabilitas juga melampaui anggaran yang ditetapkan dengan total capaian sebesar 109,02%. Hal ini dipengaruhi oleh liabilitas jangka pendek yang mencapai 135,05% dari target serta liabilitas jangka panjang sebesar 102,45%. Sementara itu, ekuitas tercatat sedikit di bawah target RKAP 2025, dengan capaian sebesar 95,17% atau senilai Rp50,35 triliun yang dipengaruhi oleh kenaikan realisasi pembayaran dividen tahun buku 2024 dan perhitungan ulang imbalan paska kerja di tahun 2025.

Pelindo's assets outperformed targets, with total realized assets reaching Rp126.05 trillion, or 103.03% of the 2025 Budget Plan. This growth was driven by current assets reaching 114.20% of the target and non-current assets reaching 101.00%. On the other hand, liabilities also exceeded the set budget, with a total achievement of 109.02%. This was influenced by short-term liabilities reaching 135.05% of the target and long-term liabilities at 102.45%. Meanwhile, equity was recorded slightly below the 2025 RKAP target, with an achievement of 95.17% or Rp50.35 trillion, influenced by an increase in the realization of dividend payments for the 2024 fiscal year and the recalculation of post-employment benefits in 2025.

Selanjutnya, perbandingan target dan realisasi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain disajikan sebagai berikut:

A comparison of targets and realizations in the profit and loss statement and other comprehensive income is presented below:

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian
Comparison of Targets and Realization of Consolidated Statement of Profit and Loss and Other Comprehensive Income

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	RKAP 2025 2025 RKAP	Realisasi 2025 2025 Realization	Pencapaian Achievement
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)*100
Pendapatan operasi Operating revenues	**33.622.881**	36.728.274	109,24%
Beban operasi Operating expenses	**(26.573.170)**	(28.588.824)	107,59%
(Beban) Pendapatan operasi lainnya – neto Other operating revenues (Expenses) - net	**88.607**	(680.943)	(768,50%)
Laba Usaha Income From Operations	**7.138.318**	7.458.507	104,49%
Pendapatan Keuangan Finance Income	**552.570**	900.264	162,92%
Beban Keuangan Finance Costs	**(2.850.090)**	(2.966.736)	104,09%
Bagian Laba Entitas Asosiasi Share of Income of Associated Entities	**326.629**	433.063	132,59%
Laba Sebelum Pajak Final dan Pajak Penghasilan Badan Income Before Final Tax and Corporate Income Tax	**5.167.427**	5.825.098	112,73%
Beban Pajak Final Final tax expense	**(1.149.529)**	(1.461792)	127,16%
Laba Tahun Berjalan Income for the Current Year	**4.017.898**	4.363.306	108,60%
Laba Komprehensif Tahun Berjalan Comprehensive Income for the Current Year	**4.502.097**	2.698.062	59,93%

Pendapatan operasi menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan realisasi sebesar Rp36,73 triliun atau 109,24% dari target RKAP 2025. Capaian ini mencerminkan solidnya aktivitas operasional Pelindo yang didukung oleh peningkatan volume layanan serta optimalisasi sumber pendapatan. Kinerja pendapatan tersebut secara langsung mendorong capaian laba usaha yang sebesar 104,49% dan capaian laba tahun berjalan sebesar 108,60% dari target, yang menunjukkan bahwa Pelindo mampu menjaga profitabilitas di atas rencana yang telah ditetapkan.

PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI STRUKTUR MODAL

Komposisi struktur modal di 2025 yang dimiliki oleh Pelindo adalah 60,05% berasal dari liabilitas, dan 39,95% berasal dari ekuitas. Adapun uraian perbandingan target dan realisasi struktur modal tahun 2025 disajikan sebagai berikut.

Operating revenue demonstrated excellent performance, reaching Rp36.73 trillion, or 109.24% of the 2025 Work Plan and Budget (RKAP) target. This achievement reflects Pelindo's solid operational activities, supported by increased service volumes and optimization of revenue sources. This revenue performance directly drove operating profit growth of 104.49% and current year profit growth of 108.60% of the target, demonstrating Pelindo's ability to maintain profitability above its target.

COMPARISON OF TARGET AND REALIZATION OF CAPITAL STRUCTURE

Pelindo's capital structure in 2025 was 60.05% from liabilities and 39.95% from equity. A comparison of the target and realization of the 2025 capital structure is shown below.

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Struktur Modal
Comparison of Targets and Realization of Capital Structure

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	RKAP 2025 2025 RKAP	Realisasi 2025 2025 Realization	Pencapaian Achievement
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)*100
Liabilitas jangka pendek Current liabilities	13.988.484	18.891.313	135,05%
Liabilitas jangka panjang Non-Current liabilities	55.445.894	56.805.889	102,45%
Total liabilitas Total liabilities	69.434.377	75.697.202	109,02%
Total ekuitas Total equity	52.914.508	50.357.604	95,17%
Total liabilitas dan ekuitas Total liabilities and equity	122.348.886	126.054.806	103,03%

Realisasi total liabilitas dan ekuitas pada tahun 2025 mencapai Rp126,05 triliun, atau 103,03% dari target RKAP 2025. Capaian tersebut terutama dipengaruhi oleh tingginya realisasi liabilitas jangka pendek yang mencapai 135,05% dan liabilitas jangka panjang sebesar 102,45%.

Total liabilities and equity realization in 2025 reached Rp126.05 trillion, or 103.03% of the 2025 Work Plan and Budget (RKAP) target. This was maily due to the high realization of short-term liabilities, reaching 135.05%, and long-term liabilities, reaching 102.45%.

PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI PEMASARAN

Uraian perbandingan target dan realisasi pemasaran disajikan sebagai berikut.

COMPARISON OF MARKETING TARGETS AND REALIZATIONS

A comparison of marketing targets and realizations is shown below.

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Pemasaran
Comparison of Marketing Target and Realization

Uraian Description	Satuan Unit	Target 2025 2025 Target	Realisasi 2025 2025 Realization	Pencapaian Achievement
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)*100%
REGIONAL 1				
BOPO	%	83,83	83,65	100,22
Pendapatan konsolidasi area Consolidated Area Revenues	miliar Rupiah thousand Rupiah	4.765,51	3.699,08	77,62
Market share bongkar muat curah Bulk Loading and Unloading Market Share	%	49	82,35	168,06
Pelaksanaan kegiatan temu mitra Implementation of Partner Meeting activities	Jumlah Total	4	6	150
% Penyusunan laporan proses RIP di Regional 1 % Preparation of RIP Process Reports in Region 1	%	70	100	142,86
Optimalisasi aset *idle* (Lahan) Optimization of Idle Assets (Land)	Jumlah Total	2	3	150
Jumlah kerja sama terkait pengusahaan lahan dan/atau bangunan Number of collaborations related to land and/or building exploitation	Jumlah Total	6	14	233,33

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Pemasaran
Comparison of Marketing Target and Realization

Uraian Description	Satuan Unit	Target 2025 2025 Target	Realisasi 2025 2025 Realization	Pencapaian Achievement
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)/(3)*100%
REGIONAL 2				
Pendapatan konsolidasi area Consolidated area revenue	miliar Rupiah thousand Rupiah	**56,4**	52,29	109
Market share bongkar muat curah Bulk Loading and Unloading Market share	%	**3550,73**	4103,49	116
Optimalisasi *aset idle* (lahan) Optimization of idle assets (land)	Jumlah Total	**59**	53	90
Program pengamanan aset dan penyelesaian permasalahan aset Asset security and problem asset resolution program	%	**2**	17	850
REGIONAL 3				
Market share bongkar muat curah Bulk loading and unloading market share	%	**67,3**	68,11	101
Optimalisasi aset *idle* Optimization of idle assets	Jumlah Total	**2**	9	450
Kerjasama jasa kepelabuhanan dengan mitra BUMN/Swasta Port service cooperation with BUMN/Private partners	Jumlah Total	**55**	179	325
REGIONAL 4				
Pendapatan Konsolidasi Area Consolidated Revenue Area	miliar Rupiah thousand Rupiah	**4.103,34**	4.231,11	103,11%
Implementasi *Key Account Management* Terintegrasi di Regional 4 Implementation of Integrated Key Account Management in Regional 4	Kegiatan Activity	**22**	22	100%
Optimalisasi *asset idle* Optimization of idle assets	Kerjasama Cooperation	**2**	2	100%
Usulan penyesuaian tarif jasa kepelabuhanan Proposed Adjustment of Port Service Tariffs	Tarif	**10**	16	160%
Market *share* curah Bulk market share	%	**60**	58,14	96,90%

REGIONAL 1

Sebagai bagian dari kegiatan pemasaran tahun 2025 juga telah dilaksanakan sebagai berikut:

1. *Forum Group Discussion* (FGD) yaitu dengan:
   a. Insan Maritim Sumatera Utara pada tanggal 26 Februari 2025.
   b. North Sumatera *Invesment, Industry and Food Trade Halal Expo* 2025 pada tanggal 18 September 2025.
2. Temu Mitra/Pelanggan yaitu dengan:
   a. Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) SKK Migas Natuna yaitu Medco E&P Natuna Ltd, Star Energy (Kakap) Ltd, dan Premier Oil Antuna Sea B.V pada tanggal 13 Februari 2025.

REGIONAL 1

As part of the 2025 marketing activities, the following were also implemented:

1. Focus Group Discussions (FGDs) with:
   a. North Sumatra Maritime Workers on February 26, 2025.
   b. North Sumatra Investment, Industry, and Food Trade Halal Expo 2025 on September 18, 2025.
2. Partner/Customer Meetings with:
   a. SKK Migas Natuna Cooperation Contract Contractors (KKKS), including Medco E&P Natuna Ltd, Star Energy (Kakap) Ltd, and Premier Oil Antuna Sea B.V. on February 13, 2025.

b. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan pada tanggal 06 Maret 2025.
c. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sungai Guntung beserta Tim pada tanggal 14 Oktober 2025.
d. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Belawan, Direktur Utama PT Indonesia Kendaraan Terminal, Ketua DPW ALFI/ ILFA Sumatera Utara dan Ketua DPC INSA Medan Belawan pada tanggal 18 November 2025.
e. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Belawan dan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan pada tanggal 06 November 2025.

3. Audiensi dengan Kamar Dagang dan Industri Sumatera Utara pada tanggal 06 Maret 2025
4. *Coffee Morning Stakeholder* Pelabuhan Tanjung Balai Asahan pada tanggal 23 April 2025.
5. *Customer visit* PT Musim Mas Belawan pada tanggal 20 Mei 2025.
6. Kegiatan *Benchmark* Pelayanan Operasional dan Penetapan Tarif Car Terminal Antara DPC ALFI/ILFA SUMUT, DPC INSA Medan Belawan, KSOP Utama Belawan dan Pelindo Group di PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk, Jakarta pada tanggal 15 Juli 2025.

REGIONAL 2

Realisasi Kegiatan Pemasaran di lingkungan Regional 2 tahun 2025 sebagai berikut:

1. Pendapatan konsolidasi area mengalami kenaikan sebesar 16% dari target didukung oleh peningkatan arus kapal di Tanjung Priok, Banten, Panjang, Palembang, Pontianak, Teluk Bayur, Jambi, Pangkal Balam, Tanjung Pandan ,peningkatan arus barang Petikemas di Tanjung Priok, Panjang, Palembang, Pontianak, Teluk Bayur dan Pangkal Balam dan peningkatan arus Non Petikemas di Tanjung Priok, Pangkal Balam.
2. *Market share* Bongkar Muat Curah terealisasi 90% dari target dikarenakan menurunnya volume curah di Cabang Tanjung Priok, Banten dan Cirebon.
3. Optimalisasi *aset idle* (lahan) terealisasi 850% di atas target, dimana terealisasi kerjasama pemanfaatan lahan di beberapa Pelabuhan dengan total luas >20 ha lahan *idle* yang teroptimalisasi.

REGIONAL 3

Secara keseluruhan, Pelindo Regional 3 telah mencapai target terkait aktivitas komersial sebagaimana yang tertuang dalam KPI Tahun 2025.

1. *Market share* bongkar muat curah terealisasi sebesar 68,11%. Capaian ini dipengaruhi oleh peningkatan kegiatan bongkar muat curah cair CPO PT Sinar Mas Agro Resource TBK di Terminal Nilam, peningkatan kegiatan bongkar muat curah cair komoditas sawit dan turunannya di Pelabuhan Bagendang.

b. Medan City Regional Tax and Retribution Management Agency (BPPRD) on March 6, 2025.
c. c. Head of the Sungai Guntung Class III Port Management Unit Office and Team on October 14, 2025.
d. Head of the Harbormaster and Main Port Authority Office of Belawan, President Director of PT Indonesia Kendaraan Terminal, Chair of the ALFI/ILFA North Sumatra Regional Leadership Council, and Chair of the INSA Medan Belawan Branch on November 18, 2025.
e. Head of the Harbormaster and Main Port Authority Office of Belawan and the Medan Class I Railway Engineering Center on November 6, 2025.

3. Audience with the North Sumatra Chamber of Commerce and Industry on March 6, 2025.
4. Coffee Morning for Tanjung Balai Asahan Port Stakeholders on April 23, 2025.
5. Customer visit by PT Musim Mas Belawan on May 20, 2025.
6. Benchmarking of Operational Services and Car Terminal Tariff Determination between the ALFI/ILFA North Sumatra Branch, the INSA Medan Belawan Branch, the Main Operational Operational Management Office of Belawan, and the Pelindo Group at PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk, Jakarta on July 15, 2025.

REGIONAL 2

Marketing Activity Realization in Region 2 in 2025 as follows:

1. Consolidated area revenue increased by 16% above target, supported by increased vessel traffic at Tanjung Priok, Banten, Panjang, Palembang, Pontianak, Teluk Bayur, Jambi, Pangkal Balam, and Tanjung Pandan; increased containerized cargo traffic at Tanjung Priok, Panjang, Palembang, Pontianak, Teluk Bayur, and Pangkal Balam; and increased non-containerized cargo traffic at Tanjung Priok, Pangkal Balam.
2. Bulk loading and unloading market share reached 90% of target due to decreased bulk volumes at the Tanjung Priok, Banten, and Cirebon ports.
3. Optimization of idle assets (land) exceeded target by 850%, resulting in land utilization collaborations at several ports with a total area of more than 20 hectares of idle land being optimized.

REGIONAL 3

Overall, Pelindo Regional 3 achieved its commercial activity targets as outlined in the 2025 KPI.

1. Bulk loading and unloading market share reached 68.11% due to increased CPO liquid bulk loading and unloading activities by PT Sinar Mas Agro Resource TBK at the Nilam Terminal and increased liquid bulk loading and unloading activities for palm oil and its derivatives at Bagendang Port.

2. Optimalisasi aset Idle terealisasi sebanyak 9 kerjasama diantaranya:
   a. Optimalisasi aset properti dengan PT Depo Indo Container Line.
   b. Optimalisasi aset properti dengan PT Aspindo Mutual.
   c. Optimalisasi aset properti dengan PT PLN (Persero) UID Jateng dan D.I Yogyakarta.
   d. Optimalisasi aset properti dengan PT PLN Indonesia Power.
   e. Optimalisasi aset properti dengan Kopelindo Surabaya.
   f. Optimalisasi aset properti dengan Perorangan (M. Syahran).
   g. Optimalisasi aset properti dengan Perorangan (Maya Ariyani).
   h. Optimalisasi aset properti dengan PT Biru Pratama Logistindo Line.
   i. Optimalisasi aset properti (ruang bangunan Gedung Pelindo Place) dengan PT Bank Syariah Indonesia.

3. Pelaksanaan Kegiatan Bina Pelanggan dan *Stakeholder Management* terealisasi sebanyak 179 kegiatan di seluruh wilayah kerja pelabuhan Pelindo Regional 3. Aktivitas Bina Pelanggan dan stakeholder manajemen ini dilakukan dalam rangka mempertahankan loyalitas dan kepuasan pelanggan, meningkatkan kualitas layanan serta untuk menangkap peluang bisnis dengan pelanggan potensial, serta untuk menjaga hubungan bisnis dengan para pemangku kepentingan.

REGIONAL 4

Sebagai bagian dari kegiatan pemasaran, beberapa program telah dilaksanakan diantaranya kegiatan managing *stakeholder* untuk menangkap informasi peluang bisnis dan kebutuhan pasar, perbaikan fasilitas sarana prasarana pelayanan dengan tujuan meningkatkan kepuasan pelanggan, serta program lainnya untuk memudahkan dalam pelayanan operasional dan pembayaran oleh pengguna jasa. Dalam penerapan kegiatan pemasaran di lingkungan Regional 4, mayoritas rencana kegiatan menunjukkan capaian sesuai dengan yang direncanakan. *Managing stakeholder* terealisasi 100%, optimalisasi aset *idle* terealisasi 100% dan usulan penyesuaian tarif jasa kepelabuhanan dan terkait kepelabuhanan masing-masing telah diusulkan sebanyak 5 untuk tarif kepelabuhanan dan 11 untuk tarif jasa terkait kepelabuhanan dari target total sebanyak 10 pengusulan tarif untuk tahun 2025. Adapun dampak dari program tersebut dapat tercermin dari pencapaian Pendapatan Konsolidasi Area dengan capaian sebesar 103,11%.

2. Optimizing idle assets through nine collaborations, including:
   a. Property asset optimization with PT Depo Indo Container Line.
   b. Property asset optimization with PT Aspindo Mutual.
   c. Property asset optimization with PT PLN (Persero) UID Central Java and Yogyakarta Special Region.
   d. Property asset optimization with PT PLN Indonesia Power.
   e. Property asset optimization with Kopelindo Surabaya.
   f. Property asset optimization with M. Syahran.
   g. Property asset optimization with Maya Ariyani.
   h. Property asset optimization with PT Biru Pratama Logistindo Line.
   i. Property asset optimization (building space in the Pelindo Place Building) with PT Bank Syariah Indonesia.
3. Customer Development and Stakeholder Management activities were implemented through 179 activities across the Pelindo Regional 3 port work area. These customer development and stakeholder management activities were carried out to maintain customer loyalty and satisfaction, improve service quality, capture business opportunities with potential customers, and maintain business relationships with stakeholders

REGIONAL 4

As part of its marketing activities, several programs were implemented, including stakeholder management activities to capture information on business opportunities and market needs, improvements to service infrastructure and facilities to increase customer satisfaction, and other programs to facilitate operational services and payments for service users. For implementing marketing activities within Region 4, the majority of planned activities achieved their targets. Stakeholder management activities achieved 100%, idle asset optimization achieved 100%, and proposed adjustments to port and port-related service tariffs were proposed, with five and eleven proposed adjustments to port and port-related service tariffs, out of a total target of 10 tariff proposals for 2025. The impact of these programs can be seen in the achievement of Consolidated Area Revenue, which reached 103.11%.

PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Realisasi Sumber Daya Manusia (SDM) Pelindo untuk induk perusahaan, *subholding* dan entitas anak pada tahun 2025 mencapai 30.898 orang atau 95,75% dari RKAP 2025. Hal ini antara lain dipengaruhi adanya pekerja yang pensiun, mutasi internal ke *subholding*, anak/cucu perusahaan dan serah terima operasi.

COMPARISON OF TARGETS AND REALIZATION OF HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT

Pelindo's Human Capital (HC) realization for the parent company, subholdings and subsidiary entities in 2025 reached 30,898 people or 95.75% of the 2025 RKAP. This was due to workers retiring, internal transfers to subholdings, the Company's subsidiaries/sub-subsidiaries and handover of operations.

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Pengembangan Sumber Daya Manusia
Comparison of Human Capital and Realization

(dalam satuan Orang)
(in People)

Uraian Description	RKAP 2025 2025 RKAP	Realisasi 2025 2025 Realization	Pencapaian Achievement
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)*100
Posisi Organik Organic Position			
Induk Perusahaan (a) Parent Company (a)	**2.320**	2.378	102,50%
Penugasan ke Subholding (b) On assignment to Subholding (b)	**4.310**	4.049	93,94%
Penugasan ke Entitas Anak Lainnya (c) On assignment to Other Subsidiaries (c)	**100**	88	88,00%
Sub Total Organik Induk Perusahaan (a+b+c) Parent Company Organic Sub Total (a+b+c)	**6.730**	6.515	96,81%
Organik Entitas Anak pada Subholding (d) Organic Subsidiaries in Subholding (d)	**2.096**	1.919	91,56%
Organik Entitas Anak Lainnya (e) Other Organic Subsidiaries (e)	**471**	443	94,06%
Total Pegawai Organik (a+b+c+d+e) Total Organic Employees (a+b+c+d+e)	**9.297**	8.877	95,48%
Posisi Non Organik, Organik Pemegang Saham Lainnya dan BOD Non Pelindo Non-Organic, Other Organic Shareholders and Non-Pelindo BOD Position			
Induk Perusahaan (f) Parent Company (f)	**4.021**	3.842	95,55%
PKWT (f1)	**59**	49	83,05%
TAD (f2)	**3.962**	3.793	95,73%
Subholding (g)	**16.992**	16.338	96,15%
PKWT (g1)	**784**	1.408	179,59%
TAD (g2)	**16.181**	14.905	92,11%
Organik Pemegang Saham Lainnya (g3) Other Organic Shareholders (g3)	**1**	1	100,00%
- BOD Non Pelindo (g4)	**26**	24	92,31%
Entitas Anak Lainnya (h) Other Subsidiaries (h)	**1.959**	1.841	93,98%
PKWT (h1)	**452**	428	94,69%
TAD (g2)	**1.500**	1.406	93,73%

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Pengembangan Sumber Daya Manusia
Comparison of Human Capital and Realization

(dalam satuan Orang)
(in People)

Uraian Description	RKAP 2025 2025 RKAP	Realisasi 2025 2025 Realization	Pencapaian Achievement
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)*100
Organik Pemegang Saham Lainnya (h3) Other Organic Shareholders (h3)	3	3	100,00%
BOD Non Pelindo (h4)	4	4	100,00%
Total Pegawai Non Organik (f+g+h) Total Non-Organic Employees (f+g+h)	22.972	22.021	95,86%
Jumlah Induk Perusahaan (a + f) Total Parent Company (a + f)	6.341	6.220	98,09%
Jumlah Subholding (b) + (d) + (g) Total Subholding (b) + (d) + (g)	23.398	22.306	95,33%
Jumlah Entitas Anak (c + e + h) Total Subsidiaries (c + e + h)	2.530	2.372	93,75%
Total	32.269	30.898	95,75%

PROYEKSI/TARGET KE DEPAN

ASUMSI DALAM MENYUSUN PROYEKSI GROUP STRATEGI KORPORASI DAN PENGEMBANGAN BISNIS

Dalam penyusunan proyeksi tahun 2026, Pelindo menggunakan beberapa asumsi dasar makro antara lain sebagai berikut:

FUTURE PROJECTIONS/TARGETS

ASSUMPTIONS WHEN MAKING PROJECTIONS

When preparing projections for 2025, Pelindo used several basic macro assumptions, including the following:

Tabel Asumsi Dasar Makro
Basic Macro Assumptions

Indikator Indicator	Asumsi Makro Ekonomi 2026 Macroeconomic Assumptions for 2026
Pertumbuhan Ekonomi Economic growth	5,40%
Tingkat Inflasi Inflation rate	2,50%
Surat Berharga Negara (SBN) 10 Tahun 10 Year Government Securities (SBN)	6,90%
Nilai Tukar (Rp per USD) Rp to USD exchange rate	Rp16.500,00
Harga Minyak Mentah (per Barel) Crude oil price (per barrel)	USD70,00

Sumber: Surat PT Danantara Asset Management (Persero) Nomor: SR.122/DI-DAM/DO/2025 tanggal 19 September 2025 perihal Pedoman Strategis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2026 Anak Perusahaan PT Danantara Asset Management (Persero) (DAM
Source: Letter from PT Danantara Asset Management (Persero) No. SR.122/DI-DAM/DO/2025 dated September 19, 2025, regarding Strategic Guidelines for the Preparation of the 2026 Work Plan and Budget (RKAP) for Subsidiaries of PT Danantara Asset Management (Persero) (DAM)

Berdasarkan asumsi tersebut di atas, Pelindo menyusun proyeksi untuk tahun 2026 diuraikan sebagai berikut.

Based on the above assumptions, Pelindo prepared the following projections for 2026.

PROYEKSI PRODUKSI

Proyeksi produksi merupakan proyeksi arus trafik operasi kepelabuhan Pelindo yaitu sebagai berikut:

PRODUCTION PROJECTIONS

The production projections for the traffic flow in Pelindo's port operations were as follows:

Tabel Proyeksi Arus Trafik
Ship Traffic Projections

Uraian Description	Satuan Unit	RKAP 2026 2026 RKAP
Arus Kapal Ship Traffic	Unit	357.898
	GT	1.437.805.671
Arus Barang Non Petikemas Non-Container Goods Traffic	Ton	201.396.697
	M3	6.575.830
	Unit	2.907.067
	MMBTU	15.844.549
	Ekor Heads	683.775
Arus Petikemas Container Traffic	Box	14.925.574
	TEUs	19.834.389
Arus Penumpang Passenger Traffic	Orang People	21.216.433

PROYEKSI KEUANGAN

Uraian proyeksi Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian tahun 2026 disajikan sebagai berikut.

FINANCIAL PROJECTIONS

The projections for the 2026 Consolidated Financial Position Report were as follows.

Tabel Proyeksi Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
Consolidated Statement of Financial Position Projectiona

(dalam miliar Rupiah)
(in million Rupiah)

Uraian Description	RKAP 2026
POSISI KEUANGAN FINANCIAL POSITION	
Aset lancar Current assets	21.435
Aset tidak lancar Non-current assets	108.441
Total aset Total assets	129.877
Liabilitas jangka pendek Short-term liabilities	19.317
Liabilitas jangka panjang Long-term liabilities	54.362
Total liabilitas Total liabilities	73.678

Tabel Proyeksi Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
Consolidated Statement of Financial Position Projectiona

(dalam miliar Rupiah)
(in million Rupiah)

Uraian Description	RKAP 2026
Ekuitas Equity	**56.198**
LABA RUGI PROFIT and LOSS	
Pendapatan Operasi Operating revenues	**41.434**
Laba Usaha Income from operations	**7.834**
Laba Sebelum Pajak Final dan Pajak Penghasilan Badan Income Before Final Tax and Corporate Income Tax	**6.260**
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Badan Income Before Corporate Income Tax	**5.280**
Laba Periode Berjalan Income for the Period	**4.823**
Total Laba Komprehensif Periode Berjalan Total Comprehensive Income for the Period	**4.913**
RASIO KEUANGAN (%) FINANCIAL RATIOS	
EBITDA Margin	**32,59%**
BOPO	**78,37%**
Return on Asset (ROA)	**3,77%**
Return on Equity (ROE)	**8,85%**
Return on Invesmeted Capital (ROIC)	**7,60%**
Rasio Kas Cash Ratio	**0,77%**
Rasio Lancar Current Ratio	**1,11%**

PROYEKSI STRUKTUR MODAL

Uraian proyeksi struktur modal tahun 2026 disajikan sebagai berikut

CAPITAL STRUCTURE PROJECTIONS

Projections for capital structure for 2026 were as follows

Tabel Proyeksi Struktur Modal
Capital Structure Projections

(dalam miliar Rupiah)
(in million Rupiah)

Uraian Description	RKAP 2026
Liabilitas Jangka Pendek Current liabilities	**19.316.631**
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current liabilities	**54.361.744**
Total Liabilitas Total Liabilities	**73.678.374**
Total Ekuitas Total Equity	**56.198.132**
Total Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	**129.876.506**

PROYEKSI KEBIJAKAN DIVIDEN

Kebijakan dividen didasarkan pada pemenuhan kepentingan Pemegang Saham serta rencana pengembangan usaha. Keputusan penentuan besaran dividen dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). Pada tahun 2026, Pelindo berencana membagikan dividen atas laba tahun buku 2025 sebesar Rp1,7 triliun. Besarnya pembayaran dividen tunai akan dilakukan melalui persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2025, penentuan nilai dividen dilakukan saat pembahasan Pra RUPS.

PROYEKSI PEMASARAN

Uraian proyeksi pemasaran tahun 2026 disajikan sebagai berikut.

REGIONAL 1

Proyeksi pemasaran Regional 1 di tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi tarif jasa kepelabuhanan dan jasa terkait kepelabuhanan pada cabang Pelabuhan Regional 1.
2. Rencana/Potensi kerjasama bisnis antara lain:
   a. Pelayanan pemanduan di Tersus Agromurni dan Tersus Sumber Tani Agung di Pelabuhan Dumai.
   b. Penanganan Kargo Curah Kering PKE dengan PT Ivomas Tunggal di Pelabuhan Dumai.
   c. Penggunaan ALMA di Pelabuhan Gunung Sitoli.
   d. Bongkar muat dengan PT. Agrimas Palma Nusantara di Pelabuhan Tembilahan.
   e. Pemanduan dengan KUPP Kelas III sungai guntung di Pelabuhan Tembilahan.
   f. Pengembangan penggunaan lahan Depo oleh PT PIL 5.000 M2 di Pelabuhan Pekanbaru.

Proyeksi pengelolaan properti Regional 1 di tahun 2026 adalah melakukan MOU/perjanjian kerjasama baru dan perpanjangan kerjasama yang diuraikan sebagai berikut:

1. Optimalisasi Gudang Eks PT Pusri, Lahan Eks PT SPIL dan Lap. Gudang 02 dan 401 di Cabang Belawan menjadi lapangan Penumpukan Multipurpose.
2. Kerjasama Pemanfaatan Lahan Eks Trisari di Cabang Belawan.
3. Kerjasama Lapangan Penumpukan di Cabang Belawan.
4. Kerjasama Lahan seluas 5.000 M2 di Cabang Pekanbaru untuk penumpukan Depo, *repair*, dan *cleaning container*.

REGIONAL 2

Rencana Kegiatan Pemasaran Regional 2 di tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi tarif jasa kepelabuhanan dan jasa terkait kepelabuhanan pada cabang Pelabuhan Regional.
2. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan pelanggan untuk existing customer dan *potential customer*.
3. Rencana Pengembangan Bisnis di lingkungan Regional 2.
   a. Pengembangan Terminal Curah Cair Bengkulu.
   b. Pembangunan Fasilitas Terminal Curah Cair di Pelabuhan Kijing.

DIVIDEND POLICY PROJECTIONS

The dividend policy is based on fulfilling the interests of Shareholders and business development plans. The decision to determine the amount of dividends is made at an Annual General Meeting of Shareholders (AGMS). In 2026, Pelindo plans to distribute dividends on profits for the 2025 fiscal year of Rp1.7 trillion. The amount of cash dividend payments will be made after approval at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGMS), with the dividend amount to be determined during a Pre-GMS discussion.

MARKETING PROJECTIONS

A description of marketing projections for 2026 are presented as follows.

REGIONAL 1

Regional 1's marketing projections for 2026 are as follows:

1. Evaluation of port service rates and port-related services at Regional 1 Port branches.
2. Planned/Potential business collaborations include:
   a. Pilotage services at Tersus Agromurni and Tersus Sumber Tani Agung at Dumai Port.
   b. Handling of PKE dry bulk cargo with PT Ivomas Tunggal at Dumai Port.
   c. Using ALMA at Gunung Sitoli Port.
   d. Loading and unloading with PT Agrimas Palma Nusantara at Tembilahan Port.
   e. Pilotage with KUPP Class III Sungai Guntung at Tembilahan Port.
   f. Developing 5,000 m2 of depot land by PT PIL at Pekanbaru Port.

Regional 1's property management projections for 2026 include signing new MOUs/cooperation agreements and extending them, as follows:

1. Optimizing the former PT Pusri warehouse, the former PT SPIL land, and Warehouses 02 and 401 at the Belawan Branch to become a multipurpose storage yard.
2. Collaborating on the use of the former Trisari land at the Belawan Branch.
3. Collaborating on the storage yard at the Belawan Branch.
4. Collaborating on 5,000 M2 of land at the Pekanbaru Branch for depot storage, repair, and container cleaning.

REGIONAL 2

Regional 2's Marketing Activity Plan for 2026 is as follows:

1. Evaluating port service rates and port-related services at Regional Port branches.
2. Implementing customer management activities for existing and potential customers.
3. Business Development Plan within Region 2.
   a. Developing the Bengkulu Liquid Bulk Terminal.
   b. Constructing Liquid Bulk Terminal Facilities at Kijing Port.

c. Jasa pengelolaan alur pelayaran Bengkulu.
d. Pelayanan Pipeline air kapal dari Dermaga di Pelabuhan Tanjung Pandan.

4. Rencana Kerjasama Pemanfaatan Lahan Idle dan peningkatan *market share* untuk optimalisasi lahan yang *idle* serta peningkatan market share. Terdapat beberapa rencana pemasaran lahan idle kepada perusahaan yang memiliki kargo (*cargo owners*) sehingga mitra kerjasama lahan dapat menjadi *captive market* dari Jasa Bongkar Muat dengan fokus namun tidak terbatas di lokasi sebagai berikut:
   a. Kerjasama Pemanfaatan Lahan *Idle* di Pelabuhan Tanjung Priok.
   b. Kerjasama Pemanfaatan Lahan *Idle* di Pelabuhan Banten.
   c. Kerjasama Pemanfaatan Lahan *Idle* di Pelabuhan Cirebon.
   d. Kerjasama Pemanfaatan Lahan *Idle* di Pelabuhan Palembang.
5. Rencana Penanganan Permasalahan Lahan
   a. Penanganan Permasalahan Lahan di Pelabuhan Tanjung Priok.
   b. Penanganan Permasalahan Lahan di Pelabuhan Teluk Bayur.
   c. Penanganan Permasalahan Lahan di Pelabuhan Banten.
   d. Penanganan Permasalahan Lahan di Pelabuhan Pangkal Balam
   e. Penanganan Permasalahan Lahan di Pelabuhan Palembang.

REGIONAL 3

Proyeksi kegiatan pemasaran yang akan dijalankan Pelindo Regional 3 Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Rencana Pengembangan Bisnis meliputi:
   a. Pengoperasian Terminal Batang
   b. Penataan Pelabuhan Tanjung Perak, Tanjung Emas dan Banjarmasin.
   c. Pengembangan ekosistem *cruise* dan *maritime tourism* di Benoa Maritim Tourism Hub - Pelabuhan Benoa berkolaborasi dengan mitra strategis.
2. Pelaksanaan *Join* Marketing Pelayanan Jasa dengan *Sub-Holding*
   a. Kerjasama bongkar muat curah kering milik PT KCC Glass di Terminal Batang.
   b. Kerjasama sewa gudang dengan Ajinomoto Group untuk mendukung kegiatan bongkar muat *raw sugar*.
   c. Kerjasama pelayanan jasa kepelabuhanan dengan PT Nayatara Namo Barito di Terminal Basirih - Pelabuhan Trisakti.
   d. Kerjasama bongkar curah cair milik PT PLN Bali pada Area Pengembangan II Pelabuhan Benoa.
3. Optimalisasi Aset Lahan
   a. Kerjasama pemanfaatan lahan dengan PT PLN Nusantara Power di Pelabuhan Benoa.
   b. Kerjasama pemanfaatan lahan dengan PT Aspindo Mutual di Pelabuhan Tanjung Perak.

c. Shipping lane management services in Bengkulu.
d. Ship water pipeline services from the wharf at Tanjung Pandan Port.

4. Collaboration Plan for Using Idle Land and Increasing Market Share. There are several plans to market idle land to cargo owners so that land cooperation partners can become captive markets for stevedoring services, focusing, but not limited to, the following locations:
   a. Collaborating for Utilizing Idle Land at Tanjung Priok Port.
   b. Cooperating on Idle Land Utilization at the Port of Banten.
   c. Cooperating on Idle Land Utilization at the Port of Cirebon.
   d. Cooperating on Idle Land Utilization at the Port of Palembang.
5. Land Issue Management Plan
   a. Land Issue Management at Tanjung Priok Port.
   b. Land Issue Management at Teluk Bayur Port.
   c. Land Issue Management at the Port of Banten.
   d. Land Issue Management at Pangkal Balam Port.
   e. Land Issue Management at the Port of Palembang.

REGIONAL 3

The projected marketing activities to be implemented by Pelindo Regional 3 in 2026 are as follows:

1. Business Development Plan including:
   a. Operation of Batang Terminal
   b. Developing the Ports of Tanjung Perak, Tanjung Emas, and Banjarmasin.
   c. Developing the cruise and maritime tourism ecosystem at the Benoa Maritime Tourism Hub - Benoa Port in collaboration with strategic partners.
2. Implementing Joint Marketing Services with Sub-Holdings
   a. Cooperating in dry bulk loading and unloading with PT KCC Glass at Batang Terminal.
   b. Cooperating in Warehouse rental with Ajinomoto Group to support raw sugar loading and unloading activities.
   c. Cooperating in Port services with PT Nayatara Namo Barito at Basirih Terminal - Trisakti Port.
   d. Cooperating in in liquid bulk unloading with PT PLN Bali in Development Area II of Benoa Port.
3. Land Asset Optimization
   a. Cooperating in Land use with PT PLN Nusantara Power at Benoa Port.
   b. Cooperating in Land use with PT Aspindo Mutual at Tanjung Perak Port.

c. Kerjasama pemanfaatan lahan dengan PT Nayatara Namo Barito di di Terminal Basirih - Pelabuhan Trisakti.

4. Evaluasi Pentarifan
   a. Penghapusan Fuel Surcharge dan Penyesuaian tarif jasa kapal di Pelabuhan Tanjung Perak, Gresik, Tanjung Intan, dan Tanjung Emas.
   b. Penyesuaian tarif tanda masuk (pas) pelabuhan di Tanjung Wangi dan Banjarmasin.
   c. Penyesuaian tarif tanda masuk (pas) pelayanan terminal penumpang di Pelabuhan Kalabahi.
   d. Penyesuaian tarif air di Pelabuhan Kotabaru, Batulicin, Sampit, dan Kumai.
   e. Penyesuaian tarif petikemas di Pelabuhan Batulicin, Maumere dan Ende-Ippi.
5. Pengelolaan Suara Pelanggan melalui *Customer Care* 102 di wilayah Pelindo Regional 3.

REGIONAL 4

Terdapat beberapa rencana kerja strategis yang akan dilakukan oleh Regional 4 pada tahun 2026 yang diharapkan menunjang tujuan pemasaran dan pengembangan bisnis, diantaranya sebagai berikut:

1. Optimalisasi Aset Lahan Tahun 2026
   a. Pemanfaatan lapangan penumpukan pada Pelabuhan Samarinda bekerjasama dengan Bluesky Group.
   b. Pemanfaatan gudang penumpukan pada Pelabuhan Samarinda bekerjasama dengan Bluesky Group.
   c. Pemanfaatan lahan untuk *buffer zone* Pertamina bekerjasama dengan Pertamina Patra.
   d. Pemanfaatan eks rumah dinas Direksi di Makassar.
   e. Pemanfaatan rumah dinas untuk komersialisasi di Cabang Ambon.
   f. Optimalisasi aset di Pelabuhan Balikpapan bekerjasama dengan PT Chevron.
2. Implementasi Joint Marketing Subholding dan Regional.
3. Pengembangan Strategi Komunikasi Korporasi untuk Hubungan Kelembagaan dan Investor.
4. Integrasi Sistem Layanan Terminal Non Petikemas Antar Terminal.
5. Kerjasama Pemerintah/BUMN/BUMD/Swasta.
6. Pengelolaan CRM.
7. Stakeholder *management* dalam bentuk *coffee morning, customer visit* dan kegiatan lain untuk membina hubungan baik dengan pelanggan.
8. Pemenuhan *market share* curah.
9. Implementasi *Integrated Planning and Control*.
10. Integrasi data Antara Aplikasi PTOS-R dengan Aplikasi Phinnisi.
11. Integrasi data penumpang dan kendaraan roro antar terminal.
12. Standarisasi Fasilitas Pendukung Terminal Penumpang.
13. Tindak Lanjut Pasca Standarisasi dan Digitalisasi Petikemas.

c. Cooperating in Land use with PT Nayatara Namo Barito at Basirih Terminal, Trisakti Port.

4. Tariff Evaluation
   a. Eliminating Fuel Surcharge and Adjustment of Ship Service Tariffs at Tanjung Perak, Gresik, Tanjung Intan, and Tanjung Emas Ports.
   b. Adjusting Port Entry Fees (Pass) at Tanjung Wangi and Banjarmasin.
   c. Adjusting Passenger Terminal Service Tariffs at Kalabahi Port.
   d. Adjusting Water Tariffs at Kotabaru, Batulicin, Sampit, and Kumai Ports.
   e. Adjusting Container Tariffs at Batulicin, Maumere, and Ende-Ippi Ports.
5. Customer Voice Management through Customer Care 102 in Pelindo Regional 3.

REGIONAL 4

Regional 4 has several strategic work plans for 2026, which are expected to support marketing and business development objectives, including the following:

1. Optimizing Land Assets in 2026
   a. Using the stacking yard at Samarinda Port in collaboration with Bluesky Group.
   b. Using the stacking warehouse at Samarinda Port in collaboration with Bluesky Group.
   c. Using land for Pertamina's buffer zone in collaboration with Pertamina Patra.
   d. Using the former official residence of the Board of Directors in Makassar.
   e. Using the official residence for commercialization at the Ambon Branch.
   f. Using assets at Balikpapan Port in collaboration with PT Chevron.
2. Implemening Joint Marketing Subholdings and Regional Marketing.
3. Developing a Corporate Communication Strategy for Institutional and Investor Relations.
4. Integrating the Non-Container Terminal Service System between Terminals.
5. Cooperation between the Government/ BUMN/BUMD/ Private Sector.
6. CRM Management.
7. Stakeholder management in the form of coffee mornings, customer visits, and other activities to foster good relationships with customers.
8. Fulfilling the bulk market share.
9. Implementing Integrated Planning and Control.
10. Integrating Data between the PTOS-R application and the Phinnisi application.
11. Integrating passenger and roll-on-roll (RORO) vehicle data between terminals.
12. Standardizing Passenger Terminal Support Facilities.
13. Following-up after standardization and digitalization of containers.

14. Tindak Lanjut Pasca Standarisasi dan Digitalisasi Non Petikemas.
15. Implementasi Program Investasi Pengembangan/ Perbaikan Dermaga dan Kolam Pelabuhan.
16. Implementasi Program Investasi Pengembangan/ Perbaikan Bangunan dan Terminal Penumpang.
17. Implementasi Program Investasi Pengembangan/ Perbaikan Jalan Akses dan Lapangan Penumpukan.
18. Implementasi Program Investasi Bidang Peralatan.

14. Following-up after standardization and digitalization of non-container items.
15. Implementing the Investment Program for the Development/Improvement of Piers and Port Basins.
16. Implementing the Investment Program for the Development/Improvement of Buildings and Passenger Terminals.
17. Implementing the Investment Program for the Development/Improvement of Access Roads and Stacking Yards.
18. Implementing the Investment Program for Equipment.

PROYEKSI PENGEMBANGAN SDM

Uraian proyeksi pengembangan SDM tahun 2026 disajikan sebagai berikut.

HC DEVELOPMENT PROJECTIONS

The projected HC development for 2026 is presented as follows.

Tabel Proyeksi Sumber Daya Manusia
Human Capital Projections

(dalam satuan Orang)
(in People)

Uraian Description	RKAP 2026
(1)	(2)
Posisi Organik Organic Positions	
Induk Perusahaan (a) Parent Company (a)	2.103
Penugasan ke *Subholding* (b) On assignment to Subholding (b	4.149
Penugasan ke Anak Perusahaan Lainnya (c) On assignment to Other Subsidiaries (c)	96
Sub Total Organik Induk Perusahaan (a+b+c) Parent Company Organic Sub Total (a+b+c)	6.348
Organik Anak Perusahaan pada *Subholding* (d) Organic Subsidiaries in Subholding (d)	1.976
Organik Anak Perusahaan Lainnya (e) Other Organic Subsidiaries (e)	417
Total Pegawai Organik (a+b+c+d+e) Total Organic Employees (a+b+c+d+e)	8.741
Posisi Non Organik, Organik Pemegang Saham Lainnya dan BOD Non Pelindo Non-Organic, Other Organic Shareholders and Non-Pelindo BOD Position	
Induk Perusahaan (f) Parent Company (f)	4.525
PKWT (f.1)	64
Tenaga Alih Daya (f.2) Transfer Energy (f.2)	4.461
Subholding (g)	18.072
PKWT (g.1)	1.323
TAD (g.2)	16.725
Pekerja Pemegang Saham Lainnya (g.3) Other Organic Shareholders (g3)	1
BOD Non Pelindo (g.4)	23

Tabel Proyeksi Sumber Daya Manusia
Human Capital Projections

(dalam satuan Orang)
(in People)

Uraian Description	RKAP 2026
(1)	(2)
Anak Perusahaan Lainnya (h) Other Subsidiaries (h)	1.312
PKWT (h.1)	469
TAD (h.2)	834
Pekerja Pemegang Saham Lainnya (h.3) Other Shareholder Employees (h.3)	3
BOD Non Pelindo (h.4)	6
Total Pegawai Non Organik (f) + (g) + (h) Total Non-Organic Employees (f) + (g) + (h)	23.909
Jumlah Induk Perusahaan (a) + (f) Total Parent Company (a) + (f)	6.628
Jumlah Subholding (b) + (d) + (g) Total Subholding (b) + (d) + (g)	24.197
Jumlah Anak Perusahaan (c) + (e) + (h) Total Subsidiaries (c) + (e) + (h)	1.825
Total	32.650

EVALUASI RENCANA JANGKA PANJANG (RJP)

Tujuan perusahaan pada RJP sebelumnya (2021-2025) sesuai dengan tujuan pendirian dari Pelindo adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan konektivitas nasional melalui pengembangan infrastruktur Pelabuhan dengan *strategic partner* yang mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta melakukan integrasi data antar terminal Pelabuhan.
2. Melakukan standardisasi pelayanan di seluruh Pelabuhan Pelindo melalui standardisasi pelayanan pada *Main Hub* dan sistemisasi proses pelabuhan pada *Main Hub*.
3. Mengintegrasikan layanan logistik nasional kepelabuhanan dengan kawasan industri/logistik untuk meningkatkan kontribusi sektoral bagi perekonomian Indonesia
4. 4) Meningkatkan skala usaha dan penciptaan nilai BUMN Layanan Pelabuhan melalui keunggulan operasional, komersial, dan keuangan yang meliputi penilaian terhadap Pendapatan Pelindo, EBT Pelindo, jumlah *throughput* petikemas dan nonpetikemas yang dilayani, penurunan *cost of fund*, dan sistem *HC Management* Terintegrasi.

EVALUATION OF LONG TERM PLANS (RJP)

The Company's objectives in the previous Long-Term Development Plan (2021-2025), in line with Pelindo's founding objectives, were as follows:

1. Improving national connectivity by developing port infrastructure with strategic partners that encourage economic growth and equity, and integrate data between port terminals.
2. Standardizing services across all Pelindo ports by standardizing services at the Main Hub and systematizing port processes at the Main Hub.
3. Integrating national port logistics services with industrial/logistics areas to increase sectoral contributions to the Indonesian economy.
4. Increasing the business scale and value creation of the SOEs through operational, commercial, and financial excellence, including assessments of Pelindo's revenue, its renewable energy (NRE), the throughput of container and non-container services, cost of funds reduction, and the Integrated HC Management system.

Keempat objektif ini dijabarkan ke dalam 11 (sebelas) target parameter dan hingga tahun 2025, perusahaan telah melakukan upaya dan capaian sebagai berikut:

1. **Konektivitas Nasional**
   Pada pengembangan pelabuhan dengan strategic partners, target 2025 ditetapkan sebesar 4 pelabuhan, dengan realisasi 1 pelabuhan atau 25%. Dari 6 pelabuhan yang diidentifikasi berpotensi dikerjasamakan, kerja sama yang sudah berjalan adalah BNCT bersama konsorsium INA dan Dubai Port. Pada integrasi data antar terminal, target 2025 sebesar 5 pelabuhan main hub, dengan realisasi 1 pelabuhan atau 20%. Integrasi telah dilakukan melalui PTOS-M dan Phinisi di Tanjung Perak (Jamrud, Nilam, Mirah) dan Makassar.
2. **Standardisasi Pelayanan Pelabuhan**
   Untuk standardisasi pelayanan main hub, target 2025 sebesar 5 pelabuhan main hub, dan realisasi telah mencapai 5 pelabuhan atau 100%. Kelima pelabuhan tersebut adalah Tanjung Priok, Belawan, Makassar, Ambon, dan Surabaya, meskipun tingkat kematangannya masih perlu ditingkatkan. Untuk sistemisasi proses pelabuhan main hub, target 2025 juga sebesar 5 pelabuhan main hub, dengan realisasi 3 pelabuhan atau 60%, yaitu Belawan, Makassar, dan Ambon.
3. **Layanan Logistik Terintegrasi**
   Pada parameter pelabuhan yang terintegrasi dengan kawasan industri/logistik, target 2025 ditetapkan sebesar 11 kawasan industri, dengan realisasi 6 kawasan industri atau 55%. Kerja sama yang sudah berjalan mencakup 5 pelabuhan dengan 6 kawasan industri, yaitu Belawan-KI Medan, Kuala Tanjung-Sei Mangkei dan KI Kuala Tanjung, Tanjung Priok-KI Timur Jabodetabek, Tanjung Perak-SIER dan JIIPE, serta Kijing-Kijing Industrial Estate.
4. **Keunggulan Operasional, Komersial, dan Keuangan**
   Pada implementasi sistem HC management, targetnya adalah 100% implementasi dan telah terealisasi 100%. Dari sisi keuangan, target pendapatan 2025 sebesar Rp38,2 triliun, dengan realisasi Rp 35,2 triliun atau 92%. Target EBT sebesar Rp8,6 triliun, dengan realisasi Rp7,5 triliun atau 87%. Dari sisi operasional, throughput petikemas ditargetkan 19,5 juta TEUs dan realisasinya 19,8 juta TEUs atau 102%. Sementara throughput non-petikemas ditargetkan 186 juta ton dan realisasinya 195,2 juta ton atau 105%. Pada penurunan cost of fund, target kumulatif sebesar Rp 2,6 triliun telah tercapai penuh, dengan realisasi Rp2,6 triliun atau 100%, terutama melalui *refinancing, buy-back,* dan pelunasan utang.

These four objectives were outlined in 11 (eleven) target parameters, and by 2025, the Company has made the following efforts and achieved the following:

1. National Connectivity
   For port development with strategic partners, the 2025 target was set at four ports, with one port (25%) realized. Of the six ports identified as potential for collaboration, the ongoing collaboration is between BNCT and the INA consortium and Dubai Port. For data integration between terminals, the 2025 target was five main hub ports, with one port (20%) realized. Integration has been implemented through PTOS-M and Phinisi in Tanjung Perak (Jamrud, Nilam, Mirah) and Makassar.

2. Standardization of Port Services
   For the standardization of main hub services, the 2025 target was five main hub ports, and realization was reached in five ports, or 100%. These five ports included Tanjung Priok, Belawan, Makassar, Ambon, and Surabaya, although their maturity level still needs to be improved. For the systematization of main hub port processes, the 2025 target was also five main hub ports, with realization at three ports, or 60%, in Belawan, Makassar, and Ambon.

3. Integrated Logistics Services
   For ports integrated with industrial/logistics areas, the 2025 target was set at 11 industrial areas, with realization at six industrial areas, or 55%. Existing collaborations includes five ports with six industrial areas: Belawan-Medan Port, Kuala Tanjung-Sei Mangkei and Kuala Tanjung Port, Tanjung Priok-Jabodetabek Port, Tanjung Perak-SIER and JIIPE, and Kijing-Kijing Industrial Estate.

4. Operational, Commercial, and Financial Excellence
   The HC management system implementation target was 100%, and this achieved 100%. Financially, the 2025 revenue target was Rp38.2 trillion, with Rp35.2 trillion realized, or 92%. The renewable energy target was Rp8.6 trillion, with Rp7.5 trillion realized, or 87%. Operationally, container throughput was targeted at 19.5 million TEUs, with 19.8 million TEUs realized, or 102%. Non-container throughput was targeted at 186 million tons, with 195.2 million tons realized, or 105%. For the cost of funds reduction, the cumulative target of Rp2.6 trillion was fully achieved, with Rp2.6 trillion realized, or 100%, mainly due to refinancing, buybacks, and debt repayments.

Tabel Capaian Target dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan
Target Achievement in the Company's Long-Term Plan

Objektif PT Pelindo	Target Parameter	Target 2025	Realisasi Hingga 2025	Progress Hingga 2025	Keterangan
Konektivitas Nasional	Pengembangan Pelabuhan dengan mitra strategis	4 Pelabuhan	1 Pelabuhan	25%	Pada Februari 2024, telah terdapat kesepakatan kerja sama dengan INADPWorld terkait proyek BNCT
	Integrasi data antar terminal	5 Pelabuhan main hub	1 Pelabuhan[1]	20%	Integrasi PTOS-M dan Phinisi di Tanjung Perak (Jamrud, Nilam, Mirah) dan Makassar
Standardisasi Pelayanan Pelabuhan	Standardisasi pelayanan main hub	5 Pelabuhan main hub	5 Pelabuhan main hub	100%	Pelabuhan Jakarta, Belawan, Makassar, Ambon, dan Surabaya telah distandardisasi
	Sistemisasi proses pelabuhan main hub	5 Pelabuhan main hub	3 Pelabuhan main hub[1]	60%	Pelabuhan Ambon, Makassar, & Belawan telah tersistemisasi, untuk Jakarta ditargetkan Go Live pada 2025
Layanan Logistik Terintegrasi	Pelabuhan yang terintegrasi dengan kawasan industri/ logistik	11 Kawasan Industri	6 Kawasan Industri[1]	55%	Telah terkoneksi KI Medan, KI Kuala Tanjung, Sei Mangkei, KI Timur Jabodetabek, SIER, dan KI Kijing
Keunggulan Operasional, Komersial, dan Keuangan	Sistem HC Management terintegrasi	Terimplementasi 100%	Terimplementasi 100%	100%	Implementasi dan integrasi system SSC/LMS/KMS/ TMS/PMS (2023-2025), HC Dashboard & Analytical Tools (2024-2025), HR Automation (2025).
	Pendapatan	Rp 38,2 Triliun	Rp 35,2 Triliun	92%	Pendapatan Pelindo hingga 2025 belum mencapai target tahun 2025
	EBT	Rp 8,6 Triliun	Rp 7,5 Triliun	87%	EBT Pelindo hingga tahun 2025 belum mencapai target tahun 2025
	Jumlah throughput petikemas yang dilayani	19,5 juta TEUs	19,8 juta TEUs	102%	Telah tercapai target throughput petikemas pada tahun 2025
	Jumlah throughput non-petikemas yang dilayani	186 juta ton	195,2 juta ton	105%	Target 2025 dapat tercapai mengingat masih rendahnya market share Pelindo di domestik dan potensi arus curah atas hilirisasi
	Penurunan cost of fund	Kumulatif Rp 2,6 T	Kumulatif Rp 2,6 T	100%	Target penurunan financing cost hingga 2024 masih on track hingga tahun 2025

KEBIJAKAN, PENGUMUMAN DAN PEMBAYARAN DIVIDEN

Perseroan membagikan dividen kepada Pemerintah Republik Indonesia sebagai Pemegang Saham berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki kompetensi inti di bidang jasa pelayanan kepelabuhanan, Pelindo senantiasa berkomitmen untuk memberikan dividen kepada Pemegang Saham serta berupaya memperlancar integrasi logistik dalam upaya mendukung pembangunan dalam lingkup makro ekonomi.

Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar Perusahaan, laba bersih dapat dibagikan kepada Pemegang Saham sebagai dividen setelah penyisihan dana cadangan wajib yang dipersyaratkan undang - undang. Penetapan dividen dilakukan oleh Pemegang Saham dalam RUPS. Sesuai

POLICIES, ANNOUNCEMENTS AND PAYMENT OF DIVIDENDS

The Company distributes dividends to the Government of the Republic of Indonesia as a Shareholder based on a resolution at a General Meeting of Shareholders (GMS). As a State-Owned Enterprise (SOE) with core competencies in the field of port services, Pelindo is committed to paying dividends to Shareholders, and facilitating logistics integration in an effort to support the macroeconomic development.

In accordance with applicable laws and regulations in Indonesia and the Company's Articles of Association, net profits can be distributed to Shareholders as dividends after setting aside mandatory reserve funds as required by law. Dividends are determined by Shareholders at the GMS. In accordance with PMK No. 05/ PMK.02/2013

dengan PMK No. 05/ PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari dividen, pembayaran dividen dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dividen ditetapkan oleh Pemegang Saham.

Jumlah dividen yang ditetapkan adalah sebesar persentase tertentu dari laba bersih (setelah pajak) yang diatribusikan kepada Pemegang Saham. Kebijakan dividen yang didasarkan pada pemenuhan kepentingan didasarkan pada kepentingan Pelindo dengan melihat berbagai hal seperti kelangsungan usaha, strategi yang akan dan sedang dijalankan, serta rencana investasi atau pengembangan usaha.

Uraian pengumuman dan pembayaran dividen disajikan sebagai berikut.

concerning Procedures for Depositing Non-Tax State Revenue from dividends, dividend payments are made no later than 1 (one) month after the dividend is determined by the Shareholders.

The dividend amount determined is a certain percentage of net profit (after tax) attributable to the Shareholders. The dividend policy is based on fulfilling interests based on Pelindo's interests after considering factors such as business continuity, strategies that will be and are currently being implemented, as well as investment or business development plans.

The dividend announcement and payment is shown below.

Tabel Pengumuman dan Pembayaran Dividen Tahun Buku 2023-2024
Announcement and Payment of Dividends for the 2023-2024 Fiscal Year

Uraian Description	**Tahun Buku 2024** **Fiscal Year 2024**	**Tahun Buku 2023** **Fiscal Year 2023**
Laba Bersih Atribusi Pemilik Entitas Induk (Rp ribu) Net Profit Attributable to Owner of Parent Entity (Rp thousand)	3.583.830.947	3.822.122.283
Dividen Kas (Rp ribu) Cash Dividend (Rp Thousand)	1.700.765.881	1.038.470.000
Dividen Non Kas *) Non-Cash Dividend *)	-	-
Lembar saham (lembar) Share sheet	40.575.584	40.575.584
Dividen Kas Per Saham (Rp penuh) Cash Dividend Per Share (Rp full amount)	41,92	25,59
Dividen Non Kas Per Saham *) Non-Cash Dividend Per Share *)	-	-
Dividend *Pay Out Ratio* (%) Dividend *Pay Out Ratio* (%)	47,46%	27,17%
Tanggal Pengumuman Announcement Date	2 Juni 2025	4 Juni 2024
Tanggal Pembayaran Dividen Kas Payment Date Cash Dividend	30 Juni 2025	2 Juli 2024
Tanggal Pembayaran Dividen Non Kas *) Payment Date Non- Cash Dividend	-	-

*) Pelindo tidak memiliki dividen non kas
*) Pelindo does not have non-cash dividends

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Pada tahun 2025, tidak dalam periode pelaporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum. Sehingga Pelindo tidak menyajikan informasi yang meliputi total perolehan dana; rencana penggunaan dana; rincian penggunaan dana; saldo dana; dan tanggal persetujuan RUPS/RUPO atas perubahan penggunaan dana.

REALIZATION OF THE USE OF PUBLIC OFFERING PROCEEDS

In 2025, there were no proceeds from public offerings, so Pelindo did not need to report any information including total fund acquisition; funds use plan; details of use of funds; fund balances; and the date of approval by the GMS/RUPO for changes in the use of funds.

INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, PENGGABUNGAN/PELEBURAN USAHA, DIVESTASI, AKUISISI, DAN RESTRUKTURISASI HUTANG DAN MODAL

MATERIAL INFORMATION CONCERNING INVESTMENTS, EXPANSIONS, BUSINESS MERGERS/CONSOLIDATIONS, DIVESTMENTS, ACQUISITIONS, AND DEBT AND CAPITAL RESTRUCTURING

INVESTASI

Uraian investasi jangka pendek dan jangka panjang Pelindo pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan sebagai berikut.

INVESTMENTS

A description of Pelindo's short-term and long-term investments as of December 31, 2025 and December 31, 2024 are as follows.

Tabel Investasi
Investments

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	31 Desember 2025 December 31, 2025	31 Desember 2024 December 31, 2024	Pertumbuhan Growth	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
INVESTASI JANGKA PENDEK SHORT-TERM INVESTMENTS				
Total deposito berjangka Total time deposits	**264.233.122**	375.940.000	(111.706.878)	(29,71%)
Efek yang diperdagangkan Marketable securities	**-**	2.057	(2.057)	(100,00%)
Total	**264.233.122**	**375.942.057**	**(111.708.935)**	**(29,71%)**
INVESTASI JANGKA PANJANG LONG TERM INVESTMENTS				
Investasi pada entitas asosiasi Investment in associates	**3.530.134.445**	4.049.626.099	(519.491.654)	(12,83%)
Investasi pada penyertaan saham Investment in share of stocks	**420.072.501**	371.206.549	48.865.952	13,16%
Investasi pada surat utang	**546.573.448**	591.587.239	(45.013.791)	(7,61%)
Total	**4.496.780.394**	**5.012.419.887**	**(515.639.493)**	**(10,29%)**

Realisasi investasi jangka pendek pada tahun 2025 sebesar Rp264,23 miliar, atau mengalami penurunan sebesar 29,71% dibandingkan realisasi tahun 2024 yang mencapai Rp375,94 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh pencairan penempatan deposito yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional. Sementara itu, realisasi investasi jangka panjang pada tahun 2025 sebesar Rp4,50 triliun juga mengalami penurunan sebesar 10,29% dibandingkan capaian tahun 2024 sebesar Rp5,01 triliun, yang disebabkan oleh penurunan nilai investasi pada entitas asosiasi serta berkurangnya investasi pada instrumen surat utang.

Short-term investment in 2025 reached Rp264.23 billion, a 29.71% decrease compared to Rp375.94 billion in 2024. This decrease was due to the liquidation of time deposits used to meet operational needs. While, long-term investment realization in 2025 of Rp4.50 trillion, also decreased by 10.29% compared to Rp5.01 trillion in 2024, due to a decrease in the value of investments in associated entities and a reduction in investment in debt instruments.

Di tengah penurunan total investasi jangka panjang, investasi pada penyertaan saham meningkat menjadi Rp420,07 miliar pada tahun 2025 dari Rp371,21 miliar pada tahun 2024 atau tumbuh 13,16%.

Perseroan memiliki penyertaan pada PT Pelabuhan Indonesia Investama (PII) yang bergerak di bidang investasi pasar modal dan konsultan bisnis. Tingkat kepemilikan Perseroan pada entitas tersebut tercatat sebesar 100,00% pada 31 Desember 2025, meningkat dibandingkan 99,00% pada 31 Desember 2024. Peningkatan persentase kepemilikan tersebut antara lain disebabkan oleh penerimaan hibah saham pada 30 September 2025 sebanyak 2.000 lembar saham dari MTI, yang setara dengan tambahan kepemilikan sebesar 1% pada PT Pelabuhan Indonesia Investama (PII). Dengan meningkatnya kepemilikan menjadi 100%, Perseroan memiliki kendali penuh atas arah strategis dan operasional entitas tersebut, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan investasi serta memperkuat sinergi dalam mendukung pengembangan portofolio usaha Pelindo.

EKSPANSI

Dalam rangka menciptakan nilai tambah *(value creation),* Pelindo telah menjalankan beberapa proyek strategis di antaranya:

1. Rencana Kerja Sama Pengembangan Terminal dan Kawasan Industri Kuala Tanjung;
2. Revitalisasi Pelabuhan Bengkulu;
3. Rencana Kerja Sama Pengembangan Terminal Batubara di Pelabuhan Panjang;
4. Pengembangan Ekosistem Terminal Kalibaru Terintegrasi;
5. Rencana Kerja Sama Pembangunan Transshipment Hub Selat Malaka;
6. Kerja Sama Pengembangan Terminal Cruise Bali Maritime Tourism Hub di Pelabuhan Benoa;
7. Rencana Kerja Sama Pembangunan Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat.

Beberapa di antaranya telah dilakukan perjanjian pendahuluan dengan calon mitra berupa Nota Kesepahaman/Kesepakatan Bersama (*Memorandum of Understanding*/MoU), Perjanjian Dasar (*Head of Agreement*/HoA), maupun Perjanjian Kerahasiaan (*Non Disclosure Agreement*/NDA) yang kemudian ditindaklanjuti melalui kajian bersama maupun pelaksanaan kerja

Despite the decline in total long-term investment, investments in equity participation increased to Rp420.07 billion in 2025 from Rp371.21 billion in 2024, representing a 13.16% increase.

The Company holds an investment in PT Pelabuhan Indonesia Investama (PII), which operates in the capital market investment and business consulting sectors. The Company's ownership in this entity was 100.00% as of December 31, 2025, an increase from 99.00% from December 31, 2024. This increase in ownership percentage was due, to the receipt of a share grant of 2,000 shares from MTI on September 30, 2025, equivalent to an additional 1% ownership interest in PT Pelabuhan Indonesia Investama (PII). With this increased ownership to 100%, the Company has full control over the strategic and operational direction of this entity, which is expected to improve investment management effectiveness and strengthen synergies in supporting the development of Pelindo's business portfolio.

EXPANSIONS

To create added value, Pelindo has instigated several strategic projects, including:

1. Cooperation Plan for the Development of the Kuala Tanjung Terminal and Industrial Estate;
2. Revitalizing the Port of Bengkulu;
3. Preparing a Cooperation Plan for a Coal Terminal at Panjang Port;
4. Developing the Integrated Kalibaru Terminal Ecosystem;
5. Preparing a Cooperation Plan for the Development of Malacca Strait Transshipment Hub;
6. Preparing a Cooperation Plan for the Development of the Bali Maritime Tourism Hub Cruise Terminal at Benoa Port;
7. Preparing a Cooperation Plan for the Development of the New Palembang Port at Tanjung Carat.

Some of these have already entered into preliminary agreements with potential partners in the form of Memoranda of Understanding (MoUs), Heads of Agreement (HoAs), and Non-Disclosure Agreements (NDAs), which will then be followed up through joint studies and work implementation.

Tabel Daftar Inisiasi Kerja Sama
List of Cooperation Initiatives

No	Deskripsi Description	Mitra Partners	Tanggal Date	Potensi Nilai Kerja Sama Potential Value of Cooperation
1	Perjanjian Pokok (HoA) tentang Pengembangan dan Pengoperasian *Container* Terminal 2 dan *Container* Terminal 3 Kalibaru serta Makassar *New Port* Head of Agreement (HoA) on the Development and Operation of Container Terminal 2 and 3 in Kalibaru and Makassar New Port	PT Pelindo Terminal Petikemas	20 Desember 2024 December 20, 2024	Potensi pendapatan untuk CT2 mencapai nilai hingga USD236 juta. Revenue potential for CT2 is estimated at up to USD 236 million.
2	*Head of Agreement* tentang Pengembangan dan Pengelolaan KIKT Head of Agreement on the Development and Management of KIKT	PT Prima Pengembangan Kawasan	20 Januari 2025 January 20, 2025	Belum terdapat kajian yang komprehensif, sehingga potensi nilai yang dapat dihasilkan belum dapat diidentifikasi dan diukur secara optimal. There has been no comprehensive study, so the potential value that can be generated cannot be optimally identified and measured.
3	*Non-Disclosure Agreement* tentang Kolaborasi Strategis Pengembangan *Cruise* Terminal Non-Disclosure Agreement on Strategic Collaboration in Cruise Terminal Development	Global Ports Holding Ltd	5 Februari 2025 February 5, 2025	Belum terdapat kajian yang komprehensif, sehingga potensi nilai yang dapat dihasilkan belum dapat diidentifikasi dan diukur secara optimal. There has been no comprehensive study, so the potential value that can be generated cannot be optimally identified and measured.
4	*Non-Disclosure Agreement* tentang *Potential Cooperation in Port Development in Indonesia and Malaysia* Non-Disclosure Agreement on Potential Cooperation in Port Development in Indonesia and Malaysia	Westports Holding Berhard	5 Februari 2025 February 5, 2025	Belum terdapat kajian yang komprehensif, sehingga potensi nilai yang dapat dihasilkan belum dapat diidentifikasi dan diukur secara optimal. There has been no comprehensive study, so the potential value that can be generated cannot be optimally identified and measured.
5	*Non-Disclosure Agreement* tentang Pengembangan Kerjasama Non-Disclosure Agreement on Development Cooperation	Qube International PTE LTD	12 September 2025 September 12, 2025	Belum terdapat kajian yang komprehensif, sehingga potensi nilai yang dapat dihasilkan belum dapat diidentifikasi dan diukur secara optimal. There has been no comprehensive study, so the potential value that can be generated cannot be optimally identified and measured.
6	Nota Kesepahaman tentang Rencana Kerja Sama Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat Memorandum of Understanding on the Cooperation Plan for the Development and Operation of the New Palembang Port in Tanjung Carat	PT Samudera Pasai Indonesia PT Sumsel Energi Gemilang	18 September 2025 September 18, 2025	Estimasi Rp72 triliun selama masa kerja sama 50 tahun. Estimated at Rp72 trillion over the 50-year cooperation period.

PENGGABUNGAN/PELEBURAN USAHA

Selama tahun 2025, Pelindo tidak melakukan kegiatan penggabungan/peleburan usaha.

DIVESTASI

Selama tahun 2025, Pelindo tidak melakukan kegiatan divestasi.

BUSINESS MERGERS/ CONSOLIDATIONS

During 2025, Pelindo did not carry out any business mergers/consolidations activities.

DIVESTMENTS

During 2025, Pelindo did not engage in any divestment activities.

AKUISISI

Selama tahun 2025, Pelindo tidak melakukan kegiatan akuisisi.

RESTRUKTURISASI UTANG DAN MODAL

Selama tahun 2025, Pelindo tidak melakukan kegiatan restrukturisasi utang dan modal.

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN, TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI

Transaksi Material adalah setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali yang memenuhi batasan nilai transaksi sama dengan 20% (dua puluh persen) atau lebih dari ekuitas Perusahaan Terbuka (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha).

Lingkup Transaksi:
Perusahaan Terbuka yang melakukan Transaksi Material dalam:

1. 1 (satu) kali transaksi; atau
2. Suatu rangkaian transaksi untuk suatu tujuan atau kegiatan tertentu, wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No.17/POJK.04/2020.

Batasan Nilai:

1. Suatu transaksi dikategorikan sebagai Transaksi Material apabila nilai transaksi sama dengan 20% (dua puluh persen) atau lebih dari ekuitas Perusahaan Terbuka.
2. Transaksi berupa perolehan dan pelepasan atas perusahaan atau segmen operasi dikategorikan sebagai Transaksi Material dalam hal:
   a. Nilai transaksi sama dengan 20% (dua puluh persen) atau lebih dari ekuitas Perusahaan Terbuka;
   b. Total aset yang menjadi objek transaksi dibagi total aset Perusahaan Terbuka nilainya sama dengan atau lebih dari 20% (dua puluh persen);
   c. Laba bersih objek transaksi dibagi dengan laba bersih Perusahaan Terbuka nilainya sama dengan atau lebih dari 20% (dua puluh persen); atau
   d. Pendapatan usaha objek transaksi dibagi dengan pendapatan usaha Perusahaan Terbuka nilainya sama dengan atau lebih dari 20% (dua puluh persen).
3. Dalam hal transaksi sebagaimana dimaksud pada (1) dan (2) dilakukan oleh Perusahaan Terbuka yang mempunyai ekuitas negatif, transaksi dikategorikan sebagai Transaksi Material apabila nilai transaksi sama dengan 10% (sepuluh persen) atau lebih dari total aset Perusahaan Terbuka.

ACQUISITIONS

During 2025, Pelindo did not engage in any acquisitions.

DEBT AND CAPITAL RESTRUCTURING

During 2025, Pelindo did not carry out debt and capital restructuring activities.

MATERIAL INFORMATION ON TRANSACTIONS CONTAINING CONFLICTS OF INTEREST AND/OR TRANSACTIONS WITH AFFILIATED PARTIES

A Material Transaction is any transaction conducted by a public company or controlled company that meets the transaction value limit of 20% (twenty percent) or more of the Public Company's equity (Financial Services Authority Regulation Number 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities).

Scope of Transaction:
Public Companies conducting Material Transactions in:

1. 1 (one) transaction; or
2. A series of transactions for a specific purpose or activity, which must comply with the provisions stipulated in POJK No. 17/POJK.04/2020.

Value Limit:

1. A transaction is categorized as a Material Transaction if the transaction value is equal to 20% (twenty percent) or more of the Public Company's equity.
2. Transactions involving the acquisition and disposal of a company or operating segment are categorized as Material Transactions if:
   a. The transaction value is equal to 20% (twenty percent) or more of the Public Company's equity;
   b. The total assets subject to the transaction divided by the Public Company's total assets is equal to or more than 20% (twenty percent);
   c. The net profit of the transaction object divided by the net profit of the Public Company is equal to or greater than 20% (twenty percent); or
   d. The business income of the transaction object divided by the business income of the Public Company is equal to or greater than 20% (twenty percent).
3. If the transactions referred to in (1) and (2) are conducted by a Public Company with negative equity, the transaction is categorized as a Material Transaction if the transaction value is equal to 10% (ten percent) or more of the Public Company's total assets.

TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, Benturan Kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang dapat merugikan perusahaan terbuka dimaksud.

Sepanjang tahun 2025 tidak terdapat transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan.

TRANSAKSI AFILIASI

Berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, Afiliasi adalah:

1. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
2. Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
3. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
4. Hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
5. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
6. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Selanjutnya transaksi Afiliasi adalah setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama, atau Pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari Perusahaan Terbuka atau Afiliasi dari anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama, atau Pengendali.

Sepanjang tahun 2025 tidak terdapat transaksi material yang memenuhi kategori transaksi pihak afiliasi.

TRANSAKSI PIHAK BERELASI

Pelindo dan entitas anaknya melakukan transaksi dengan pihak berelasi sesuai dengan definisi yang diuraikan pada PSAK 224: Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi. Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang mungkin tidak sama dengan

CONFLICT OF INTEREST TRANSACTIONS

Based on the provisions of Financial Services Authority Regulation No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions, a Conflict of Interest is the difference between the economic interests of a public company and the personal economic interests of members of the board of directors, board of commissioners, majority or controlling shareholders that could be detrimental to the public company in question.

Throughout 2025, there were no transactions containing Conflicts of Interest.

AFFILIATE TRANSACTIONS

Based on the provisions of Financial Services Authority Regulation Number 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions, Affiliates are:

1. Family relationships through marriage and descent up to the second degree, either horizontally or vertically;
2. Relationships between a party and its employees, directors, or commissioners;
3. Relationships between two companies where there is one or more members of the same board of directors or board of commissioners;
4. Relationships between a company and a party that, directly or indirectly, controls or is controlled by the company;
5. Relationships between two companies that are controlled, directly or indirectly, by the same party; or
6. Relationships between a company and its major shareholders.

Also, an Affiliated Transaction is any activity and/or transaction conducted by a public company or controlled company with an Affiliate of the public company or an Affiliate of a Member of the Board of Directors, Member of the Board of Commissioners, Majority or Controlling Shareholder , including any activity and/or transaction conducted by a Public Company or Controlled Company for the benefit of an Affiliate of the Public Company or an Affiliate of a Member of the Board of Directors, Member of the Board of Commissioners, Major Shareholder, or Controller.

Throughout 2025, there were no material transactions that met the category of affiliated party transactions.

RELATED PARTY TRANSACTIONS

Pelindo and its subsidiaries engage in transactions with related parties in accordance with the definition outlined in PSAK 224: Related Party Disclosures. These transactions are conducted on terms agreed to by both parties, which may differ from other transactions with unrelated parties.

transaksi lain yang dilakukan dengan pihakpihak yang tidak berelasi. Transaksi dan saldo yang material dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 44. Kecuali diungkapkan khusus sebagai pihak berelasi, maka pihak-pihak lain yang disebutkan dalam Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan pihak tidak berelasi

Material transactions and balances with related parties are disclosed in Note 44. Unless specifically disclosed as related parties, other parties mentioned in the Notes to the consolidated financial statements are unrelated parties.

Dalam kegiatan usaha normal, Grup melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Entitas dianggap berelasi jika entitas tersebut, antara lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mengendalikan atau mengendalikan bersama, atau memiliki pengaruh signifikan atas Grup dalam pengambilan keputusan keuangan dan operasional. Entitas juga dianggap berelasi jika entitas tersebut sepengendalian dengan Grup.

In the normal course of business, the Group engages in transactions with related parties. An entity is considered related if it can directly or indirectly control or jointly control, or has significant influence over the Group in making financial and operational decisions. An entity is also considered related if it is under common control with the Group.

Pemerintah Republik Indonesia adalah pemegang saham Perusahaan. Seluruh entitas yang dimiliki dan dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia serta entitas dimana Pemerintah Republik Indonesia memiliki pengaruh signifikan merupakan pihak berelasi.

The Government of the Republic of Indonesia is a shareholder of the Company. All entities owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia, as well as entities over which the Government of the Republic of Indonesia has significant influence, are related parties.

Ringkasan sifat hubungan dan transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut

A summary of the nature of significant relationships and transactions with related parties is as follows.

Tabel Transaksi Pihak Berelasi
Related Party Transactions

Hubungan Relationship	**Pihak berelasi** **Type of Transaction**
Pemegang Saham Shareholder	Negara Republik Indonesia Republic of Indonesia
	PT Danantara Asset Management
Entitas berelasi dengan Pemerintah Entities related to the Government	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
	PT Bank Raya Indonesia Tbk
	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
	PT Pertamina Port and Logistics
	PT Solusi Bangun Andalas
	PT Solusi Bangun Indonesia Tbk
	BPJS Kesehatan
	BPJS Ketenagakerjaan
	PT Semen Tonasa
	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
	PT BRI Danareksa Sekuritas

Tabel Transaksi Pihak Berelasi
Related Party Transactions

Hubungan Relationship	Pihak berelasi Type of Transaction
	PT Pertamina Patra Niaga
	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
	PT Industri Sandang Nusantara (Persero)
	PT Asuransi Kredit Indonesia
	PT Adhi Guna Putera
	PT Industri Nabati Lestari
	PT Adhi Karya (Persero) Tbk
	PT PLN Indonesia Power
	PT PLN Nusantara Power
	PT BNI Life Insurance
	PT Jasa Marga Tollroad Maintenance
	PT Telekomunikasi Selular
	PT Pupuk Indonesia Logistik
	PT Semen Baturaja Tbk
	PT Semen Padang
	Koperasi Pegawai PT Pelindo III
	PT PLN Energi Gas
	PT Perikanan Nusantara (Persero)
	PT Aneka Tambang Tbk
	PT BGR Logistik Indonesia
	PT Freeport Indonesia
	PT Pelayaran Bahtera Adhiguna
	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
	PT Taspen (Persero)
	Lembaga National Single Window
	PT Asuransi Jasaraharja Putra
	PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)
	PT Djakarta Lloyd (Persero)
	PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)
	PT Dharma Lautan Nusantara
	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)
	PT Pertamina Gas
	PT Pertamina Marine Engineering
	Konsorsium PP - Waskita
	PT Borneo Alumina Indonesia
	PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore

Tabel Transaksi Pihak Berelasi
Related Party Transactions

Hubungan Relationship	**Pihak berelasi** **Type of Transaction**
	PT Bukit Prima Bahari
	PT Sarana Bandar Nasional
	PT Kereta Api Indonesia (Persero)
	PT Belawan New Container Terminal (BNCT)
	PT Portek Indonesia
	PT Pengembang Listrik Nasional Energi Gas
	PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB)
	PT Asuransi Jasa Indonesia
	PT Berdikari (Persero)
	PT Terminal Nilam Utara
	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan
	PT Danareksa (Persero)
	PT Waskita Beton Precast Tbk
	PT Pupuk Sriwidjaya Palembang
	PT Pertamina Trans Kontinental
	PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero)
	PT Surveyor Indonesia (Persero) Tbk
	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
	PT Industri Kereta Api (Persero)
	PT Jembatan Nusantara
	PT Rekayasa Industri
	PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara
	Perusahaan Umum BULOG
	PT Pertamina Hulu Energi
	PT Asuransi Jiwasraya (Persero)
	PT Jasa Prima Logistik
	Dana Pensiun Pelindo Purnakarya ("DP3")
	Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (“DP4”)
	Instansi Pemerintah
	Tentara Nasional Indonesia
	Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)

Tabel Transaksi Pihak Berelasi
Related Party Transactions

Hubungan Relationship	Pihak berelasi Type of Transaction
Entitas asosiasi Associated Entities	Jakarta International Container Terminal (JICT)
	New Priok Container Terminal One (NPCT1)
	PT Rumah Sakit Pelabuhan (RSP)
	PT Pelindo Husada Citra (PHC)
	PT Ambang Barito Nusapersada (Ambapers)
	PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS)
	Kerja Sama Operasi Terminal Petikemas Koja (KSO TPK KOJA)

KEWAJARAN TRANSAKSI
Transaksi dengan pihak berelasi telah dilakukan secara wajar sesuai dengan kepentingan Perseroan (*arm's length principle*). Transaksi telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bebas dari konflik kepentingan.

TRANSACTION FAIRNESS
Transactions with related parties have been carried out fairly in accordance with the Company's interests (Arm's Length Principle). Transactions have been carried out in accordance with statutory regulations and are free from conflicts of interest.

ALASAN DILAKUKAN TRANSAKSI
Seluruh transaksi dengan pihak berelasi dilaksanakan atas dasar alasan kebutuhan usaha Pelindo serta ditujukan untuk meningkatkan kinerja Pelindo.

REASON FOR THE TRANSACTIONS
All transactions with related parties are carried out based on Pelindo's business needs and are aimed at improving Pelindo's performance.

REALISASI (NILAI) TRANSAKSI
Rincian akun signifikan dengan pihak-pihak berelasi (pemerintah, entitas pemerintah atau dinyatakan lain) adalah sebagai berikut.

REALIZATION OF TRANSACTIONS (VALUE)
Details of significant accounts with related parties (government, government entity or otherwise) are as follows.

Tabel Realisasi (Nilai) Transaksi Pihak Berelasi
Realization (Value) of Related Party Transactions

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	31 Desember 2025 December 31, 2025		31 Desember 2024 December 31, 2024	
	Total	Persentase Percentage (%)	Total	Persentase Percentage (%)
Kas dan setara kas Cash and cash equivalents	**875.132.096**	**0,69**	6.612.734.551	5,19
Investasi jangka pendek Short term investments	**70.000.000**	**0,06**	375.940.000	0,29
Piutang usaha Trade receivables	**468.936.129**	**0,29**	455.819.901	0,25
Piutang Lain-lain Other receivables	**149.634.818**	**0,12**	154.908.237	0,12
Aset kontrak Contract Assets	**194.673.861**	**0,15**	174.234.826	0,11
Aset lancar lainnya Other current assets	**1.429.370.043**	**1,14**	1.271.319.025	0,99

Tabel Realisasi (Nilai) Transaksi Pihak Berelasi
Realization (Value) of Related Party Transactions

(dalam ribuan Rupiah)
(in thousand Rupiah)

Uraian Description	31 Desember 2025 December 31, 2025		31 Desember 2024 December 31, 2024	
	Total	Persentase Percentage (%)	Total	Persentase Percentage (%)
Utang usaha Trade payables	**128.326.253**	**0,14**	96.565.849	0,11
Uang muka pelanggan Customer advances	**52.835.677**	**0,06**	72.362.148	0,10
Uang titipan Deposits	**114.815.747**	**0,15**	108.901.301	0,15
Liabilitas jangka pendek lainnya Other Current Liabilities	**270.849.201**	**0,36**	770.266.105	1,00
Utang Lembaga Keuangan Non-Bank Non-Bank Financial Institution payables	**-**	**-**	1.502.045.095	1,94
Liabilitas jangka panjang lainnya Other Non-current Liabilities	**23.965**	**0,00**	18.722.028	0,02

RUJUKAN PENGUNGKAPAN DALAM LAPORAN KEUANGAN

Rincian nama pihak terkait realisasi (nilai) transaksi pihak berelasi disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan No. 44 yang terlampir pada Laporan Tahunan ini. Transaksi berelasi tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan.

DISCLOSURE REFERENCE IN THE FINANCIAL STATEMENTS

Details of the names of parties related to the realization (value) of related party transactions are presented in Note No. 44 in the Financial Statements attached to this Annual Report. These related transactions are business activities carried out to generate business revenue and are carried out routinely, repeatedly and/or continuously.

PEMENUHAN PERATURAN TERKAIT

Selama tahun 2025, tidak terdapat pelanggaran atas peraturan perundang-undangan terkait dengan transaksi dengan pihak berelasi serta tidak terdapat transaksi pihak berelasi yang membutuhkan persetujuan RUPS. Perseroan memastikan pemenuhan ketentuan transaksi pihak berelasi melalui penerapan kebijakan internal yang selaras dengan PSAK 224 tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi, termasuk pelaksanaan transaksi berdasarkan prinsip kewajaran (*arm's length principle*).

Terkait transaksi pihak berelasi berupa pinjaman kepada Dewan Komisaris dan Direksi, Perseroan memiliki kebijakan untuk tidak memberikan pinjaman pada Dewan Komisaris dan Direksi.

FULFILLMENT OF RELATED REGULATIONS

During 2025, there were no violations of laws and regulations related to transactions with related parties, and no related party transactions required GMS approval. The Company ensured compliance with related party transaction requirements through itss internal policies aligned with PSAK 224 concerning Related Party Disclosures, including transactions based on the arm's length principle.

For related party transactions in the form of loans to the Commissioners and Directors, the Company has a policy not to provide loans to the Board of Commissioners and Board of Directors.

KEBIJAKAN MEKANISME REVIEW TRANSAKSI SERTA PERAN DEWAN KOMISARIS DAN KOMITE AUDIT TERKAIT TRANSAKSI PIHAK BERELASI

Setiap transaksi dengan pihak berelasi dilaksanakan melalui mekanisme *review* sesuai kebijakan yang telah ditetapkan oleh Perseroan. Transaksi tersebut dilakukan berdasarkan persyaratan yang disepakati oleh kedua belah pihak dengan mengacu pada prinsip kewajaran (*arm's length principle*). Seluruh transaksi material dengan pihak berelasi terlebih dahulu direviu oleh Komite Audit untuk memastikan bahwa transaksi tersebut dilakukan demi kepentingan terbaik Pelindo dan Pemegang Saham, serta selanjutnya wajib memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris. Selain itu, dalam hal jika transaksi pihak berelasi tertentu memerlukan persetujuan Pemegang Saham, keputusan atas transaksi tersebut dilakukan oleh Pemegang Saham Independen yang tidak memiliki kepentingan dalam transaksi dimaksud.

TRANSACTION REVIEW MECHANISM POLICY AND THE ROLE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND AUDIT COMMITTEE RELATED TO RELATED PARTY TRANSACTIONS

All transactions with related parties are conducted through a review mechanism in accordance with the Company's established policies. These transactions are conducted based on terms agreed upon by both parties, adhering to the arm's length principle. All material transactions with related parties are first reviewed by the Audit Committee to ensure they are in the best interests of Pelindo and its Shareholders. They must then obtain approval from the Board of Commissioners. Also, if a specific related party transaction requires Shareholder approval, the decision on such transaction is made by an Independent Shareholder who has no interest in the transaction.

PERNYATAAN DIREKSI TERKAIT TRANSAKSI PIHAK BERELASI

Direksi menyatakan bahwa transaksi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar *(arm's length principle).*

BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT REGARDING RELATED PARTY TRANSACTIONS

The Board of Directors declares that the transactions have undergone adequate procedures to ensure they were carried out in accordance with generally accepted business practices, including compliance with the arm's length principle.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN DAMPAKNYA

Informasi perubahan peraturan perundang-undangan disajikan sebagai berikut.

CHANGES TO LEGISLATION AND THE IMPACT

Information on changes can be seen below.

Tabel Perubahan Peraturan Perundang Undangan Tahun 2025
Changes to Laws and Regulations in 2025

Peraturan Undang-Undang Laws and Regulations	
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara Law Number 16 of 2025 concerning the Fourth Amendment to Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises	
Pokok Pengaturan Basic Settings	
Definisi BUMN dan Anak Perusahaan Definition of State-Owned Enterprises and Subsidiaries	Pasal 1 1. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang memenuhi minimal salah satu ketentuan berikut: a. seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh NRI melalui penyertaan langsung; atau b. terdapat hal istimewa yang dimiliki NRI. Anak Usaha BUMN adalah anak perusahaan BUMN dan turunannya yang didirikan oleh BUMN dalam rangka memenuhi kepentingan usaha BUMN. Article 1 1. A State-Owned Enterprise, hereinafter abbreviated as BUMN, is a business entity that meets at least one of the following requirements: a. all or most of its capital is owned by Indonesian citizens through direct participation; or b. has special characteristics owned by Indonesian citizens. 2. A BUMN Subsidiary is a subsidiary of a BUMN and its derivatives established by a BUMN to meet the BUMN business interests.

Tabel Perubahan Peraturan Perundang Undangan Tahun 2025
Changes to Laws and Regulations in 2025

	Pasal 3A - Kekuasaan Presiden dan Badan sebagai Pemegang Saham BUMN (3) Kekuasaan (Presiden) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikuasakan kepada Menteri selaku pemegang saham seri A Dwiwarna dan Badan sebagai pemegang saham seri B pada Holding Investasi dan Holding Operasional, selaku wakil Pemerintah Pusat dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Pasal 9B - Direksi Dalam Kepengurusan BUMN 1. Direksi menjalankan pengurusan BUMN untuk kepentingan BUMN serta sesuai dengan tujuan BUMN. 2. Dalam menjalankan pengurusan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi berwenang menentukan kebijakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. 3. Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan. 4. Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili BUMN adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar. Pasal 14A - Komposisi Kepengurusan Direksi Dalam BUMN 1. Direksi Persero terdiri atas 1 (satu) orang anggota Direksi Persero atau lebih. 2. Dalam hal Direksi Persero terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi Persero atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi Persero ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. 3. Komposisi Direksi Persero sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. 4. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Persero ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi Persero.
Pengelolaan BUMN BUMN Management	Article 3A - Powers of the President and the Agency as Shareholders of BUMN (3) The powers (of the President) as referred to in paragraphs (1) and (2) are delegated to the Minister as the holder of Series A Dwiwarna shares and the Agency as the holder of Series B shares in the Investment Holding and Operational Holding, as representatives of the Central Government in the ownership of separated state assets. Article 9B - Board of Directors in the Management of BUMN 1. The Board of Directors shall manage the BUMN in the interests of the BUMN and in accordance with the objectives of the BUMN. 2. In managing the BUMN as referred to in paragraph (1), the Board of Directors shall have the authority to determine policies in accordance with the provisions of this Law and/or the articles of association. 3. The Board of Directors as referred to in paragraph (1) shall represent the BUMN both inside and outside the court. 4. If the Board of Directors consists of more than 1 (one) person, each member of the Board of Directors shall be authorized to represent the BUMN, unless otherwise specified in the articles of association. Article 14A - Composition of the Board of Directors in BUMN 1. The Board of Directors of a Limited Liability Company (Persero) consists of 1 (one) or more members of the Board of Directors. 2. If the Board of Directors of a Limited Liability Company (Persero) consists of 2 (two) or more members of the Board of Directors, the division of duties and authority among the members of the Board of Directors is determined by a resolution of the GMS. 3. The composition of the Board of Directors of a Limited Liability Company (Persero) as referred to in paragraph (1) is determined by a resolution of the GMS. 4. If the GMS as referred to in paragraph (2) does not determine this, the division of duties and authority of the members of the Board of Directors of a Limited Liability Company (Persero) is determined by a resolution of the Board of Directors of the Limited Liability Company (Persero).
	Pasal 14 - Penegasan Menteri Bertindak Sebagai RUPS 1. Menteri menghadiri RUPS selaku pemegang saham negara pada Persero. 2. Menteri bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham Persero dimiliki oleh negara atau bertindak selaku pemegang saham pada Persero dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negara.
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) General Meeting of Shareholders (GMS)	Article 14 - Confirmation of the Minister's Acting as GMS 1. The Minister shall attend the GMS as the state shareholder in a Limited Liability Company (Persero). 2. The Minister shall act as the GMS if all of the shares in the Limited Liability Company are owned by the state or as the shareholder in the Limited Liability Company if not all of the shares are owned by the state.

Tabel Perubahan Peraturan Perundang Undangan Tahun 2025
Changes to Laws and Regulations in 2025

Rencana Kerja Jangka Panjang (di Pelindo dikenal dengan Rencana Jangka Panjang (RJP) dan Rencana Kerja Tahunan (di Pelindo dikenal dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)	Pasal 15G - Rencana Kerja Jangka Panjang dan Rencana Kerja Tahunan 1. Direksi Persero wajib menyiapkan rencana kerja jangka panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan Persero yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. 2. Rencana kerja jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani bersama dengan Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan. a. Berdasarkan Bagian Penjelasan RKJP memuat: b. Evaluasi pelaksanaan rencana sebelumnya; c. Posisi perusahaan saat ini; d. Asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan; e. Misi Persero, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan, dan program kerja; f. Anggaran perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja; g. Proyeksi keuangan Persero. 3. Direksi Persero wajib menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. 4. Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat juga anggaran tahunan Persero untuk tahun buku yang akan datang. 5. Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan. 6. Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus ditelaah terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris sebelum disampaikan kepada RUPS. 7. Dalam hal rencana kerja tahunan yang disampaikan belum mendapatkan persetujuan dari RUPS, rencana kerja tahunan tahun yang lampau diberlakukan. 8. Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana kerja jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.
Long-Term Work Plan (known at Pelindo as the Long-Term Plan (RJP) and Annual Work Plan (known at Pelindo as the Corporate Work and Budget Plan (RKAP)	Article 15G - Long-Term Work Plan and Annual Work Plan 1. The Board of Directors of a Limited Liability Company (Persero) is required to prepare a long-term work plan, which is a strategic plan containing the Company's goals and objectives to be achieved within a period of 5 (five) years. 2. The long-term work plan referred to in paragraph (1), which has been jointly signed with the Board of Commissioners, is submitted to the GMS for approval. According to the Explanatory Section, the RKJP contains: a. Evaluation of the implementation of the previous plan; b. The company's current position; c. Assumptions used in its preparation; d. The Company's mission, business objectives, business strategies, company policies, and work programs; e. The company's budget, detailed for each work program budget; f. The Company's financial projections. 3. The Board of Directors of a Limited Liability Company (Persero) is required to prepare an annual work plan before the start of the upcoming fiscal year. 4. The annual work plan referred to in paragraph (3) also includes the Company's annual budget for the upcoming fiscal year. 5. The annual work plan referred to in paragraph (3) shall be submitted to the GMS for approval. 6. The annual work plan referred to in paragraph (3) must first be reviewed by the Board of Commissioners before being submitted to the GMS. 7. If the submitted annual work plan has not been approved by the GMS, the previous year's annual work plan shall apply. 8. Further provisions regarding the long-term work plan referred to in paragraph (1) and the annual work plan referred to in paragraph (3) shall be regulated in a Ministerial Regulation.

Tabel Perubahan Peraturan Perundang Undangan Tahun 2025
Changes to Laws and Regulations in 2025

	Pasal 3AL - Relevansi dengan Pelindo Terkait dengan Pengusulan hapus buku dan/atau hapus tagih, pengusulan kontrak manajeman *holding* operasional kepada badan 1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3AK ayat melakukan pengelolaan operasional BUMN dan tugsa lain yang ditetapkan menteri/badan), Holding Operasional berwenang melakukan tindakan sebagai berikut: a. Menyusun dan mengusulkan rencana kerja dan anggaran perusahaan operasional; b. Menerbitkan surat utang dan/atau menerima pinjaman; c. Memberikan pinjaman dan/atau penjaminan kepada BUMN atau Anak Usaha BUMN; d. Melakukan pengelolaan dan penatausahaan atas aset *Holding* Operasional, BUMN, dan Anak Usaha BUMN; e. Mengusulkan hapus buku dan/atau hapus tagih atas aset Holding Operasional dan/ atau BUMN kepada Badan; f. Mengusulkan kontrak manajemen *Holding* Operasional kepada Badan untuk mendapatkan persetujuan; dan g. Tindakan lain yang ditetapkan oleh Menteri atau Badan atau diatur dalam anggaran dasar *Holding* Operasional. 2. Definisi Aset pada huruf e berdasarkan Penjelasan Pasal 62D untuk: Definisi Aset BUMN: Piutang atau Aktiva Tetap
Kewenangan Holding Operasional Holding Operational Authority	Pasal 3AL - Relevansi dengan Pelindo Terkait dengan Pengusulan hapus buku dan/atau hapus tagih, pengusulan kontrak manajeman holding operasional kepada badan 1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3AK ayat melakukan pengelolaan operasional BUMN dan tugsa lain yang ditetapkan menteri/badan), Holding Operasional berwenang melakukan tindakan sebagai berikut: a. Menyusun dan mengusulkan rencana kerja dan anggaran perusahaan operasional; b. Menerbitkan surat utang dan/atau menerima pinjaman; c. Memberikan pinjaman dan/atau penjaminan kepada BUMN atau Anak Usaha BUMN; d. Melakukan pengelolaan dan penatausahaan atas aset Holding Operasional, BUMN, dan Anak Usaha BUMN; e. Mengusulkan hapus buku dan/atau hapus tagih atas aset Holding Operasional dan/ atau BUMN kepada Badan; f. Mengusulkan kontrak manajemen Holding Operasional kepada Badan untuk mendapatkan persetujuan; dan g. Tindakan lain yang ditetapkan oleh Menteri atau Badan atau diatur dalam anggaran dasar Holding Operasional. 2. Definisi Aset pada huruf e berdasarkan Penjelasan Pasal 62D untuk: Definisi Aset BUMN: Piutang atau Aktiva Tetap

Tabel Perubahan Peraturan Perundang Undangan Tahun 2025
Changes to Laws and Regulations in 2025

Prinsip Business Judgement Rules (BJR) Business Judgment Rules (BJR) Principle	Pasal 9F - Anggota Direksi dan Dekom Tidak Dapat Dimintai Pertanggungjawaban Hukum 1. Anggota Direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas erugian jika dapat membuktikan: a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; b. Telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan tujuan BUMN; c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupaun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan d. Telah mengambil tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan e. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. 2. Anggota Dekom atau Dewas BUMN tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian jika dapat membutktikan: a. Telah melakukan pengawasan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan BUMN dan sesuai dengan tujuan BUMN; b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan c. Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Article 9F - Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners Cannot Be Held Legally Accountable 1. Members of the Board of Directors cannot be held legally responsible for losses if they can prove: a. The loss was not due to their fault or negligence; b. They have carried out management in good faith and with due care for the benefit of and in accordance with the objectives of the BUMN; c. They have no conflict of interest, either directly or indirectly, in the management actions that resulted in the loss; d. They have taken management actions that resulted in the loss; and e. They have taken action to prevent the occurrence or continuation of the loss. 2. Members of the Board of Commissioners or the Supervisory Board of a BUMN cannot be held legally responsible for losses if they can prove: a. They have carried out supervision in good faith and with due care for the benefit of the BUMN and in accordance with the objectives of the BUMN; b. They have no personal interest, either directly or indirectly, in the management actions of the Board of Directors that resulted in the loss; and c. They have provided advice to the Board of Directors to prevent the occurrence or continuation of the loss.
Masa Jabatan Direksi dan Dekom Board of Directors and Board of Commissioners Term of Office	Pasal 15D - Masa Jabatan Direksi 1. Masa jabatan Direksi Persero ditentukan oleh RUPS 2. Pasal 27D - Masa Jabatan Dekom 3. Masa Jabatan Dekom Persero Ditetapkan oleh RUPS Article 15D - Board of Directors Term of Office 1. The term of office of the Company's Board of Directors is determined by the GMS. 2. Article 27D - Board of Commissioners Term of Office 3. The Term of Office of the Company's Board of Commissioners is Determined by the GMS.
Pengelolaan Aset BUMN BUMN Asset Management	Pasal 62A - Pengelolaan Aset dengan Tata Kelola Yang Baik 1. Aset BUMN wajib dikelola oleh BUMN dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. 2. Pengurusan Aset BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direksi berdasarkan mekanisme yang diatur oleh Direksi dengan memperhatikan pembatasan kewenangan Direksi yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan, anggaran dasar, dan/ atau keputusan RUPS/Menteri. 3. Aset BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipindahtangankan, dijaminkan, dan/atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Pasal 62C - Ketentuan Lebih Lanjut Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Aset BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62A diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri Article 62A - Asset Management with Good Governance 1. BUMN assets must be managed by the BUMN in accordance with the principles of good corporate governance. 2. The management of BUMN assets as referred to in paragraph (1) shall be carried out by the Board of Directors based on mechanisms established by the Board of Directors, taking into account the limitations on the Directors' authority as stipulated in laws and regulations, the articles of association, and/or decisions of the GMS/Minister. 3. BUMN assets as referred to in paragraph (1) may be transferred, pledged as collateral, and/or entered into cooperation with third parties. Article 62C - Further Provisions Further provisions regarding the management of BUMN assets as referred to in Article 62A shall be further regulated in a ministerial regulation.

Tabel Perubahan Peraturan Perundang Undangan Tahun 2025
Changes to Laws and Regulations in 2025

Penghapusbukuan dan Penghapustagihan Write-Downs and Write-Offs	Pasal 3AL - Kewenangan Holding Operasional untuk mengusulkan hapustagih atau hapusbuku atas aset BUMN Holding Operasional berwenang melakukan e. Mengusulkan hapus buku dan/atau hapus tagih atas aset Holding Operasional dan/atau BUMN kepada Badan; Definisi Aset pada huruf e berdasarkan Penjelasan Pasal 62D: Berupa Piutang atau Aktiva Tetap Pasal 62D - Ketentuan mengenai kewenangan BUMN untuk melakukan hapus buku dan/atau hapus tagih 1. BUMN mempunyai wewenang untuk melakukan hapus buku dan/atau hapus tagih. 2. Hapus buku dan/atau hapus tagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk Aset BUMN Berdasarkan Penjelasan: Aset yang dimaksud adalah Piutang atau Aktiva Tetap 3. Aset berupa piutang yang dapat dihapusbukukan merupakan piutang macet yang telah dilakukan upaya penagihan piutang secara optimal, namun tidak tertagih dan tidak disebabkan oleh adanya kesalahan. 4. BUMN wajib terus melakukan upaya penagihan atas piutang yang telah dihapusbukukan sebelum piutang dilakukan hapus tagih. Pasal 62E - Hapus tagih piutang yang telah dilakukan hapus buku dilakukan dengan persetujuan Badan BUMN dapat melakukan hapus tagih piutang yang telah dihapus buku dengan persetujuan Menteri untuk Perum dan Badan untuk Persero. Pasal 62F - Pelaporan Hapus buku dan hapus tagih kepada Menteri dan Badan yang disampaikan dalam laporan tahunan BUMN dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan 1. BUMN melaporkan pelaksanaan hapus buku dan hapus tagih kepada Menteri dan Badan. 2. Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam laporan tahunan BUMN dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Pasal 62G - Pelaporan hapus buku dan hapus tagih oleh badan kepada DPR dan Presiden Badan melaporkan pelaksanaan hapus buku dan hapus tagih kepada alat kelengkapan DPR RI yang membidangi BUMN dan Presiden. Pasal 62H Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara hapus buku atas Aset BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62D dan hapus tagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62E, serta tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62F ditetapkan dalam Peraturan Menteri.
	Article 3AL - Authority of the Operational Holding to Propose Write-Offs or Write-Offs for BUMN Assets The Operational Holding is authorized to e. Propose write-offs and/or write-offs for the assets of the Operational Holding and/or BUMN to the Agency; Definition of Assets in letter e based on the Explanation of Article 62D: In the Form of Receivables or Fixed Assets Article 62D - Provisions regarding the authority of BUMN to Conduct Write-Downs and/or Write-Offs 1. BUMN have the authority to conduct write-downs and/or write-offs. 2. Write-offs and/or write-offs as referred to in paragraph (1) may be conducted for BUMN Assets. Based on the Explanation: The assets in question are Receivables or Fixed Assets. 3. Assets in the form of receivables that can be written off are bad receivables for which optimal collection efforts have been made, but which are uncollectible and not due to any error. 4. BUMN are required to continue to make collection efforts for receivables that have been written off before the receivables are written off. Article 62E - Write-off of Receivables Written Off with the Approval of the Agency BUMN may write off receivables that have been written off with the approval of the Minister for Public Corporations (Perum) and the Agency for Limited Liability Companies (Persero). Article 62F - Reporting of Write-Offs and Write-Offs to the Minister and the Agency, as submitted in the BUMN annual report and/or at any time as needed 1. BUMN report the write-downs and write-offs to the Minister and the Agency. 2. The implementation report as referred to in paragraph (1) shall be submitted in the BUMN annual report and/or at any time as needed. Article 62G - Reporting of Write-Downs and Write-Offs by the Agency to the House of Representatives (DPR) and the President The Agency shall report the implementation of write-downs and write-offs to the DPR RI's supporting body in charge of BUMN and the President. Article 62H Further provisions regarding the procedures for writing off SOE assets as referred to in Article 62D and write-offs as referred to in Article 62E, as well as the reporting procedures as referred to in Article 62F, are stipulated in a Ministerial Regulation.

Tabel Perubahan Peraturan Perundang Undangan Tahun 2025
Changes to Laws and Regulations in 2025

Satuan Pengawasan Intern Internal Audit Unit	Pasal 67 - Penegasan bahwa SPI wajib dibentuk pada BUMN 1. Pada setiap BUMN dibentuk satuan pengawasan intern. 2. Satuan pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama, Article 67 - Affirmation that the IAU must be established in BUMNs 1. Every BUMN shall establish an internal supervisory unit. 2. The IAU referred to in paragraph (1) shall be led by a head who reports to the president director.
Komite Audit Audit Committee	Pasal 70 - Pembentukan Komite Audit Oleh Dekom yang bekerja secara kolektif 1. Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas wajib membentuk komite audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya. 2. Komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas 3. Selain komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas dapat membentuk komite lain. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan komite lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri. Article 70 - Establishment of an Audit Committee by the Board of Commissioners, Working Collectively: 1. The Board of Commissioners or the Supervisory Board is obliged to establish an audit committee that works collectively and functions to assist the Board of Commissioners or the Supervisory Board in carrying out its duties. 2. The audit committee as referred to in paragraph (1) is led by a chairperson who is responsible to the Board of Commissioners or the Supervisory Board. 3. In addition to the audit committee as referred to in paragraph (1), the Board of Commissioners or the Supervisory Board may establish other committees. 4. Further provisions regarding the audit committee as referred to in paragraph (1) and other committees as referred to in paragraph (3) are regulated in a Ministerial Regulation.
Peneriksaan Laporan Keuangan Financial Report Audit	Pasal 71 - Pemeriksaan Laporan Keuangan yang Dilakukan Oleh Akuntan yang ditetapkan oleh RUPS 1. Pemeriksaan laporan keuangan perusahaan tahunan dilakukan oleh akuntan publik yang ditetapkan oleh RUPS untuk persero dan ditetapkan oleh Menteri untuk Perum. 2. BPK berwenang melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan ataspermintaan alat kelengkapan DPR RI yang membidangi BUMN. Pasal 71A - KAP dilakuken oleh akuntan yang terdaftar oleh OJK Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan BUMN dilakukan oleh akuntan publik yang terdaftar pada Badan Pemeriksa Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan. Article 71 - Audit of Financial Statements Conducted by Accountants Appointed by the GMS 1. Audits of annual company financial statements are conducted by public accountants appointed by the GMS for limited liability companies and by the Minister for public corporations. 2. The Supreme Audit Agency (BPK) is authorized to conduct audits for specific purposes of BUMN in accordance with statutory provisions. 3. Audits for specific purposes as referred to in paragraph (2) may only be conducted at the request of the DPR RI's supporting body in charge of BUMN. Article 71A - Public Accounting Firms Conducted by Accountants Registered with the Financial Services Authority (OJK) Audit of BUMN financial management and accountability is conducted by public accountants registered with the Audit Board and the Financial Services Authority (OJK).

Tabel Perubahan Peraturan Perundang Undangan Tahun 2025
Changes to Laws and Regulations in 2025

Status Direksi, Komisaris dan Karyawan Status of Directors, Commissioners, and Employees	Pasal 9G - Direksi dan Dekom bukan penyelenggara Negara Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara. Pasal 87 Ayat (2) dan Ayat (5) - Karyawan BUMN bukan penyelenggara negara 1. Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan karyawan BUMN yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. 2. Karyawan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan penyelenggara negara. Article 9G - The Board of Directors and the Board of Commissioners are not State Administrators Members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of a BUMN are not state administrators. Article 87 Paragraphs (2) and (5) - BUMN Employees are not state administrators 1. The human resources referred to in paragraph (1) are BUMN employees whose appointment, dismissal, position, rights, and obligations are determined based on company regulations or collective labor agreements that comply at least with the provisions of laws and regulations in the field of employment. 2. BUMN employees referred to in paragraph (2) are not state administrators.

Tabel Perubahan Peraturan Perundang Undangan Tahun 2025
Changes to Laws and Regulations in 2025

SDM (Diluar Status Bukan Penyelenggara Negara) HC (Outside of Non-State Official Status)	Pasal 87 - Ketentuan mengenai karyawan secara umum 1. Dalam penyelenggaraan BUMN, BUMN didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan berdaya saing global. 2. Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan karyawan BUMN yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. 3. Karyawan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari masyarakat setempat dan/atau penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Karyawan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berasal dari karyawan perempuan dapat menduduki posisi jabatan Direksi, Dewan Komisaris, atau jabatan manajerial lain di BUMN. 5. Karyawan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditugaskan dan/atau diperbantukan ke BUMN lain untuk jangka waktu tertentu. 6. Karyawan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar kompetensi yang ditentukan oleh peraturan perusahaan. 7. Karyawan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk serikat pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. 8. Ketentuan mengenai karyawan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri. Pasal 87A - TKA dapat bekerja di BUMN Pasal 87B - Pendidikan dan Pelatihan SDM BUMN 1. Untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia BUMN, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN dan/atau Badan mengembangkan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia termasuk pengembangan pembentukan entitas yang kegiatan pengembangan kompetensi pada BUMN. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri. Article 87 - General provisions regarding employees 1. For the management of a BUMN, the BUMN is supported by professional and globally competitive human resources. 2. The human resources referred to in paragraph (1) are BUMN employees whose appointment, dismissal, position, rights, and obligations are determined based on company regulations or collective labor agreements that comply, at a minimum, with the provisions of laws and regulations in the field of employment. 3. BUMN employees referred to in paragraph (2) may be drawn from the local community and/or persons with disabilities in accordance with the provisions of laws and regulations. 4. BUMN employees referred to in paragraph (2) who are female may hold positions on the Board of Directors, the Board of Commissioners, or other managerial positions in the BUMN. 5. BUMN employees referred to in paragraph (2) may be assigned and/or seconded to other BUMNs for a specified period. 6. BUMN employees referred to in paragraph (2) must meet the competency standards stipulated by company regulations. 7. BUMN employees as referred to in paragraph (2) may form labor unions in accordance with statutory provisions. 8. Provisions regarding BUMN employees as referred to in paragraphs (2) through (4) are regulated in a Ministerial Regulation. Article 87A - Foreign Workers May Work in BUMN Article 87B - Education and Training of BUMN Human Resources 1. To improve the competence of BUMN human resources, the ministry that oversees government affairs in the field of BUMN and/or the Agency shall develop human resource education and training, including the development of entities that carry out competency development activities in BUMN. 2. Further provisions regarding human resource education and training as referred to in paragraph (1) are regulated in a Ministerial Regulation.

Tabel Perubahan Peraturan Perundang Undangan Tahun 2025
Changes to Laws and Regulations in 2025

Penugasan BUMN dan Anper BUMN and Anper Assignments	Pasal 87C - Penugasan Khusus 1. Pemerintah Pusat dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN atau Anak Usaha BUMN. 2. Penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri. 3. Penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Presiden. 4. Penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan tujuan BUMN serta mempertimbangkan kemampuan BUMN atau Anak Usaha BUMN 5. Dalam hal penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membutuhkan pendanaan dan/atau secara finansial tidak layak, Pemerintah Pusat memberikan pendanaan. 6. BUMN atau Anak Usaha BUMN yang diberikan penugasan khusus oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pencatatan administratif atau pembukan yang terpisah mengenai penugasan tersebut dari pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan. 7. Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Article 87C - Special Assignments 1. The Central Government may assign special assignments to BUMN or BUMN Subsidiaries. 2. Special assignments referred to in paragraph (1) must first obtain the approval of the Minister. 3. Special assignments referred to in paragraph (1) are determined by the President. 4. Special assignments referred to in paragraph (1) are carried out while still taking into account the objectives of the BUMN and the capabilities of the BUMN or BUMN Subsidiaries. 5. If the special assignment referred to in paragraph (1) requires funding and/or is financially unfeasible, the Central Government shall provide the funding. 6. BUMN or BUMN Subsidiaries assigned special assignments by the Central Government as referred to in paragraph (1) shall maintain separate administrative records or separate bookkeeping for the assignment in order to achieve the Company's business objectives. 7. Further provisions regarding special assignments as referred to in paragraphs (1) through (6) shall be regulated in a Government Regulation.
Penyelesaian Perselisihan di Lingkungan BUMN Dispute Resolution within BUMN	Pasal 87F - Musyawarah untuk mufakat dan mediasi 1. Setiap sengketa yang terjadi antar-BUMN, Anak usaha BUMN, dan/atau perusahaan terafiliasi diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. 2. Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dmiaksud pada ayat (1) tidak tercapai, atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa, beda pendapat, atau perselisihan diselesaikan melalui seorang mediator. 3. Dalam hal para pihak dalam jangka waktu 14 hari kalender tidak bersepakat dalam menunjuk seorang mediator, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN akan menunjuk seorang mediator. 4. Kesepakatan penyelesaian sengketa, beda pendapat, atau perselisihan adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan iktikad baik. Article 87F - Deliberation to Reach Consensus and Mediation 1. Any disputes between BUMN, BUMN Subsidiaries, and/or affiliated companies shall be resolved through deliberation to reach consensus. 2. If deliberation to reach consensus as referred to in paragraph (1) is not achieved, upon written agreement of the parties, the dispute, difference of opinion, or disagreement shall be resolved through a mediator. 3. If the parties fail to agree on the appointment of a mediator within 14 calendar days, the ministry responsible for government affairs in the BUMN sector shall appoint a mediator. 4. The agreement to resolve the dispute, difference of opinion, or disagreement is final and binding on the parties and must be implemented in good faith.
Satuan Pengawasan Intern Internal Audit Unit	Pasal 67 - Pembentukan SPI 1. Pada setiap BUMN dibentuk satuan pengawasan intern. 2. Satuan pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama. Article 67 - Establishment of IAU 1. Each BUMN shall establish an IAU. 2. The IAU referred to in paragraph (1) shall be led by a head who is responsible to the president director.

Tabel Perubahan Peraturan Perundang Undangan Tahun 2025
Changes to Laws and Regulations in 2025

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Social and Environmental Responsibility	Pasal 87E - Bentuk pelaksanaan TJSL, sumber dana TJSL, TJSL juga dapat berupa Donasi 1. BUMN, Anak Usaha BUMN, dan turunannya wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. 2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: a. Pembinaan, pelatihan, pemberdayaan, dan kerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta lembaga lain; dan b. Pembinaan masyarakat di seluruh wilayah NKRI dengan mengutamakan masyarakat di wilayah sekitar BUMN berada. 3. Sumber dana pembinaan dan kerja sama dengan usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi dan pembinaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. Penyisihan sebagian laba bersih BUMN pada tahun anggaran sebelumnya; b. Anggaran kegiatan yang diperhitungkan sebagai biaya pada BUMN dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau c. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Pembinaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh BUMN yang bersangkutan dan dapat bekerja sama dengan pihak lain. 5. BUMN dalam batas kepatutan dapat memberikan donasi untuk amal atau tujuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri. Article 87E - Forms of SER, sources of SER funds, SER can also be in the form of donations 1. BUMN, BUMN subsidiaries, and their derivatives are required to implement social and environmental responsibilities. 2. Social and environmental responsibilities as referred to in paragraph (1) are implemented through: a. Guidance, training, empowerment, and collaboration with micro, small, and medium enterprises, cooperatives, and other institutions; and b. Community development throughout the territory of the Republic of Indonesia, prioritizing communities in the areas surrounding the BUMN's operations. 3. Sources of funds for guidance and cooperation with micro, small, and medium enterprises, cooperatives, and community development as referred to in paragraph (2) include: a. Appropriation of a portion of the BUMN's net profit from the previous fiscal year; b. Activity budgets calculated as expenses for the BUMN in the current fiscal year; and/or c. Other legitimate sources in accordance with statutory provisions. 4. Community development as referred to in paragraph (2) letter b is carried out by the relevant BUMN and may collaborate with other parties. 5. BUMNs may, within the limits of propriety, make donations to charities or social causes in accordance with statutory provisions. 6. Further provisions regarding the implementation of social and environmental responsibilities as referred to in paragraphs (1) through (5) are regulated in a Ministerial Regulation.
Hak Monopoli Monopoly Rights	Pasal 86M - Pemberian Hak Monopoli dari Presiden Kepada BUMN 1. Presiden dapat memberikan hak monopoli kepada BUMN atau Anak Usaha BUMN untuk memproduksi dan/ atau memasarkan barang dan/atau jasa yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, dalam rangka kepentingan negara dan/ atau hal lain yang berdasarkan pertimbangan Presiden. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian hak monopoli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Article 86M - Granting of Monopoly Rights by the President to BUMNs 1. The President may grant monopoly rights to a BUMN or a BUMNSubsidiary to produce and/or market goods and/or services related to the public's well-being and to production sectors that are important to the state, in the interests of the state and/or other matters based on the President's considerations. 2. Further provisions regarding the granting of monopoly rights as referred to in paragraph (1) shall be regulated in a Government Regulation.

Informasi Penyesuaian yang dilakukan Pelindo
Information on Adjustments Made by Pelindo

Undang-Undang ini dalam Tahun 2025 mengalami 2 (dua) kali Perubahan terakhir adalah Perubahan Keempat pada 6 Oktober 2025, sehingga belum terdapat langkah penyesuaian yang bersifat langsung, dan Pelindo pun belum melakukan penyesuaian terhadap peraturan internal. Hal ini disebabkan oleh sifat perubahan dalam undang-undang tersebut. Meski demikian, Pelindo telah membentuk tim kajian sebagai langkah antisipatif untuk mengkaji potensi dampak dari peraturan turunan yang mungkin memengaruhi proses bisnis Pelindo

This law underwent two amendments in 2025, the most recent being the Fourth Amendment on October 6, 2025. Consequently, there have been no immediate adjustments, and Pelindo has not yet made any adjustments to its internal regulations. This is due to the nature of the changes in the law. However, Pelindo has formed a review team as a precautionary measure to assess the potential impact of derivative regulations that may impact Pelindo's business processes.

Tabel Perubahan Peraturan Perundang Undangan Tahun 2025
Changes to Laws and Regulations in 2025

Dampak Terhadap Laporan Keuangan Impact on Financial Statements
Tidak memiliki dampak kuantitatif signifikan terhadap Laporan Keuangan Pelindo No significant quantitative impact on Pelindo's Financial Statements

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

ALASAN PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penerapan standar akuntansi keuangan dilakukan sebagai bentuk kepatuhan terhadap Amandemen Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku pada tahun berjalan. Implementasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyusunan dan penyajian laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan terbaru, sehingga dapat meningkatkan transparansi, akurasi, dan keterbandingan informasi keuangan yang disajikan kepada para pemangku kepentingan. Selain itu, penerapan amandemen PSAK juga mencerminkan komitmen entitas dalam mengikuti perkembangan regulasi dan praktik akuntansi yang berlaku secara nasional.

INFORMASI PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pelindo dan entitas anak (Grup) menerapkan untuk pertama kalinya beberapa standar dan amandemen tertentu yang efektif untuk periode tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025 (kecuali dinyatakan lain).

CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES

REASONS FOR CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES

The application of financial accounting standards is carried out in compliance with the Amendments to the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) in effect for the current year. This aims to ensure that the preparation and presentation of financial statements comply with the latest provisions, thereby increasing the transparency, accuracy, and comparability of financial information presented to stakeholders. Furthermore, the PSAK amendments also reflects the entity's commitment to keeping abreast of developments in national accounting regulations and practices.

INFORMATION ON CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES

Pelindo and its subsidiaries (the Group) applied for the first time certain standards and amendments effective for annual periods beginning on or after January 1, 2025 (unless otherwise stated).

Tabel Perubahan Kebijakan Akuntansi Tahun 2025
Changes in Accounting Policies in 2025

Perubahan Kebijakan Akuntansi Changes in Accounting Policies	**Paparan Konsekuensi/Penyesuaian Yang Dilakukan** **Exposure to Consequences and Adjustments Made**	**Dampak Perubahan Kebijakan Akuntansi Terhadap Laporan Keuangan** **Impact of Accounting Policies Changes on Financial Reports**
Amandemen PSAK 221: Kekurangan Ketertukaran Amendments to PSAK 221: Lack of Interchangeability	Amandemen tersebut menetapkan bagaimana entitas harus menilai apakah suatu mata uang dapat dipertukarkan serta bagaimana entitas harus menentukan kurs *spot* ketika ketertukaran *(exchangeability)* tidak tersedia. Amandemen tersebut juga mensyaratkan pengungkapan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk memahami bagaimana ketidakmampuan mata uang tersebut untuk dipertukarkan dengan mata uang lainnya memengaruhi, atau diharapkan akan memengaruhi, kinerja keuangan, posisi keuangan, dan arus kas entitas. The amendments establishes how entities should assess whether a currency is convertible and how they should determine the spot rate when currency exchangeability is unavailable. The amendment also requires disclosure of information that enables users of financial statements to understand how the currency's inconversion affects, or is expected to affect, the entity's financial performance, financial position, and cash flows.	Amandemen ini tidak berdampak terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup. This amendment has no impact on the Group's consolidated financial statements.

Tabel Perubahan Kebijakan Akuntansi Tahun 2025
Changes in Accounting Policies in 2025

Perubahan Kebijakan Akuntansi Changes in Accounting Policies	**Paparan Konsekuensi/Penyesuaian Yang Dilakukan** **Exposure to Consequences and Adjustments Made**	**Dampak Perubahan Kebijakan Akuntansi Terhadap Laporan Keuangan** **Impact of Accounting Policies Changes on Financial Reports**
PSAK 117: Kontrak Asuransi PSAK 117: Insurance Contracts	PSAK 117 merupakan standar akuntansi baru yang komprehensif mencakup pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan untuk kontrak asuransi. PSAK 117 menggantikan PSAK 104: Kontrak Asuransi. PSAK 117 berlaku untuk seluruh jenis kontrak asuransi (yaitu, jiwa, non-jiwa, asuransi langsung, dan reasuransi), tanpa memandang jenis entitas yang menerbitkannya, serta berlaku pula untuk jenis garansi tertentu dan instrumen keuangan dengan fitur partisipasi diskresioner. Tujuan utama PSAK 117 adalah menyediakan model akuntansi yang komprehensif untuk kontrak asuransi yang lebih berguna dan konsisten bagi entitas asuransi, mencakup seluruh aspek akuntansi yang relevan. PSAK 117 didasarkan pada model umum yang dilengkapi dengan: 1. Penyesuaian khusus untuk kontrak dengan fitur partisipasi langsung *(variable fee approach)* 2. Pendekatan yang disederhanakan *(premium allocation approach)* yang terutama berlaku untuk kontrak berdurasi pendek PSAK 117 is a new, comprehensive accounting standard covering the recognition and measurement, presentation, and disclosure of insurance contracts. PSAK 117 replaces PSAK 104: Insurance Contracts. PSAK 117 applies to all types of insurance contracts (namely, life, non-life, direct insurance, and reinsurance), regardless of the type of entity issuing them. It also applies to certain types of guarantees and financial instruments with discretionary participation features. The primary objective of PSAK 117 is to provide a comprehensive accounting model for insurance contracts that is more useful and consistent for insurance entities, covering all relevant accounting aspects. PSAK 117 is based on a general model supplemented by: 1. Special adjustments for contracts with direct participation features (variable fee approach) 2. A simplified approach (premium allocation approach) that primarily applies to short-duration contracts	Standar baru tersebut tidak memiliki dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup. This new standard has no impact on the Group's consolidated financial statements.

TINGKAT KESEHATAN PERSEROAN

Peringkat (*rating*) yang disampaikan dalam rangka penilaian tingkat kesehatan adalah pemeringkatan yang dilakukan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) yang ditandatangani tanggal 16 April 2026 dengan hasil sebagai berikut:

1. Peringkat Berdiri Sendiri (*Stand Alone Rating*): $_{id}$AA+ (Double A Plus; *Standalone*)
2. Peringkat Akhir (Final Rating): $_{id}$AAA/Stable (Triple A; Stable Outlook)

Dengan demikian, Tingkat kesehatan untuk PT Pelabuhan Indonesia (Persero) pada Tahun Buku 2025 adalah Sangat Sehat sesuai Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 pasal 81.

COMPANY HEALTH LEVEL

The rating presented as part of the creditworthiness assessment is a rating issued by PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) on April 16, 2026, with the following results:

1. Standalone Rating: $_{id}$AA+ (Double A Plus; Standalone)
2. Final Rating: $_{id}$AAA/Stable (Triple A; Stable Outlook)

Thus, the financial health rating for PT Pelabuhan Indonesia (Persero) for the 2025 fiscal year is “Very Healthy” in accordance with Article 81 of Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-2/MBU/03/2023.

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

RINCIAN MASALAH YANG TIMBUL SELAMA TAHUN BUKU YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA

Sampai dengan tahun 2025, kinerja Pelindo Group dapat bertahan di tengah dinamika tantangan eksternal dan domestik. Sejumlah tantangan eksternal dan domestik yang mempengaruhi kinerja operasional dan finansial Pelindo selama tahun 2025 antara lain:

1. Penyelesaian Amandemen atas Perizinan dan Konsesi

   Sebagai bagian dari penyelesaian administrasi Pasca Penggabungan, Pelindo telah diamanahkan untuk menyelesaikan amandemen ataupun novasi atas beberapa perizinan dan konsesi Perusahaan diantaranya Perizinan Lingkungan serta Perjanjian Konsesi Pelabuhan.

   Selama tahun 2024 telah dilakukan Penandatanganan 4 (empat) Adendum Perjanjian Konsesi Pada Pelabuhan Eksisting antara Pelindo dengan 4 (empat) Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan yaitu Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Belawan untuk Pelabuhan Kuala Tanjung, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok untuk Terminal Kalibaru, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak untuk Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Makassar untuk Makassar New Port Tahap I. Sehingga sampai dengan akhir tahun 2024, telah diselesaikan 14 (empat belas) addendum Perjanjian Konsesi.

   Sampai dengan Triwulan IV 2025, sedang dilakukan kajian dan pembahasan lebih lanjut untuk penyesuaian perjanjian konsesi yaitu:

   a. Penyesuaian/pemisahan Perjanjian Konsesi eksisting (untuk Pelabuhan Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak dan Makassar) menjadi 87 (delapan puluh tujuh) Perjanjian Konsesi, dengan progress saat ini dalam Proses reviu oleh Group Hukum atas Hasil Legal Opinion (Pendapat Hukum) Jamdatun oleh Group Hukum terhadap pending isu dalam penyesuaian Perjanjian Konsesi;
   b. Addendum Perjanjian Konsesi Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak, dengan pelaksanaan kajian addendum konsesi yang direncanakan akan dilaksanakan di tahun 2026;
   c. Addendum Perjanjian Konsesi Terminal Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok, dengan pelaksanaan kajian addendum konsei yang direncanakan akan dilaksanakan di tahun 2026/2027;

SINESS CONTINUITY INFORMATION

DETAILS OF PROBLEMS ARISING DURING THE FISCAL YEAR THAT AFFECTED BUSINESS ACTIVITIES

In 2025, Pelindo Group's performance survived despite the dynamics of external and domestic challenges. The external and domestic challenges that affected Pelindo's operational and financial performance during 2025 included:

1. Completion of Amendments to Permits and Concessions

   As part of the Post-Merger administrative process, Pelindo was entrusted with completing amendments or innovations to several of the Company's permits and concessions, including Environmental Permits and Port Concession Agreements.

   During 2024, four Concession Agreement Addenda were signed at existing ports between Pelindo and four Technical Implementation Units (UPT) within the Directorate General of Sea Transportation, Ministry of Transportation: the Harbormaster and Main Port Authority of Belawan for Kuala Tanjung Port, the Harbormaster and Main Port Authority of Tanjung Priok for Kalibaru Terminal, the Harbormaster and Main Port Authority of Tanjung Perak for the Surabaya West Shipping Channel (APBS), and the Harbormaster and Main Port Authority of Makassar for Makassar New Port Phase I. Therefore, by the end of 2024, 14 Concession Agreement Addenda had been completed.

   As of the QIV 2025, further studies and discussions were underway to adjust the concession agreements, including:

   a. Adjustment/separation of existing Concession Agreements (for the Ports of Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, and Makassar) into 87 Concession Agreements, with the current progress being in the review process by the Legal Group of the Jamdatun Legal Opinion issued by the Legal Group regarding pending issues in the adjustment of the Concession Agreements;
   b. Addendum to the Kijing Terminal Concession Agreement at Pontianak Port, with the concession addendum review planned for 2026;
   c. Addendum to the Kalibaru Terminal Concession Agreement at Tanjung Priok Port, with the concession addendum review planned for 2026/2027;

d. Perjanjian Konsesi Kegiatan Pengusahaan Kepelabuhanan pada Wilayah Tertentu di Perairan yang Berfungsi sebagai Pelabuhan di Perairan Pulau Nipa Selat Singapura Provinsi Kepulauan Riau, *progress* saat ini menunggu persetujuan dari Menteri Perhubungan;
e. Perjanjian Konsesi Terminal Multipurpose Batang, progress saat ini sedang dalam proses negosiasi besaran fee konsesi 5% dengan Kementerian Perhubungan.

Sedangkan untuk amandemen perizinan berupa Perubahan Persetujuan Lingkungan Pasca Merger, telah dilaksanakan pembahasan *draft* perubahan izin pada 96 lokasi (cabang dan terminal) dari regional 1 sampai dengan regional 4 dalam 7 *batch* bersama tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2023 lalu.

Pada tahun 2024 proses dilanjutkan dengan pemenuhan persyaratan perizinan dasar, persetujuan teknis dan administrasi lainnya untuk proses pengesahan draft SKKLH (Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup), dimana pemenuhan persyaratan secara sekuens tersebut adalah hasil penyesuaian Undang-Undang Cipta Kerja.

Adapun detail proses pemenuhan persyaratan pengesahan sampai dengan Triwulan IV 2025 adalah sebagai berikut: dari total Pemenuhan SKKLH Pasca Merger sebanyak 96 berkas, sampai dengan Triwulan IV 2025, sebanyak 72 *draft* SKKLH dalam proses dan 24 SKKLH telah terbit. Terdapat perubahan mekanisme input di Amdalnet, sehingga seluruh dokumen yang telah submit amdalnet dikembalikan ke pemrakarsa.

HAL-HAL YANG BERPOTENSI BERPENGARUH TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA

Berdasarkan hal-hal yang dijabarkan pada rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha di atas, Manajemen menganalisis bahwa meskipun terdapat tantangan yang tengah dihadapi oleh Pelindo, hal tersebut masih dapat diakomodir dengan menggunakan inisiatif strategis yang tepat dan dengan utilisasi sumber daya yang optimal, sehingga kelangsungan usaha Pelindo dapat terjaga dengan baik.

ASESMEN MANAJEMEN ATAS HAL-HAL YANG BERPOTENSI BERPENGARUH TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA

Manajemen Perseroan melakukan asesmen atas kemampuan Perseroan untuk melanjutkan kelangsungan usahanya, asesmen dilakukan dengan berdasarkan berbagai faktor seperti analisis kekuatan kondisi keuangan maupun non keuangan. Berdasarkan hasil asesmen, Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan memiliki sumber

d. Concession Agreement for Port Business Activities in Certain Areas in the Waters Functioning as Ports in the Waters of Nipa Island, Singapore Strait, Riau Islands Province, currently awaiting approval from the Minister of Transportation;

e. The Batang Multipurpose Terminal Concession Agreement is currently in the process of negotiating a 5% concession fee with the Ministry of Transportation.

Regarding the permit amendments in the form of Post-Merger Environmental Approval Amendments, draft permit amendments were discussed for 96 locations (branches and terminals) in Regional 1 to 4 in seven batches with the Ministry of Environment and Forestry in 2023.

In 2024, the process continued with the fulfillment of basic permit requirements, technical approvals, and other administrative requirements for the ratification of the draft Environmental Feasibility Decree (SKKLH). This sequential fulfillment of these requirements was due to adjustments to the Job Creation Law.

Details of the ratification requirements fulfillment process through QIV 2025 were as follows: of the total 96 Post-Merger SKKLH documents, as of QIV 2025, 72 draft SKKLHs are in process and 24 have been issued. There was a change in the input mechanism in the Environmental Impact Assessment (Amdalnet), resulting in all submitted documents being returned to the initiator.

MATTERS THAT COULD POTENTIALLY INFLUENCE BUSINESS CONTINUITY

Based on the matters outlined in the details of the problems that arose during the fiscal year that affected the business activities above, Management analysis shows that even though there were challenges being faced by Pelindo, these could still be accommodated by using the appropriate strategic initiatives with optimal resource utilization, so that Pelindo's business continuity can be well maintained.

MANAGEMENT ASSESSMENT OF MATTERS THAT COULD POTENTIALLY INFLUENCE BUSINESS CONTINUITY

The Company's management conducts assessments on the Company's business continuity, with the assessments carried out based on factors such as analysis of the strength of financial and non-financial conditions. Based on the assessment results, the Company believes that the Company has the resources to continue its business

daya untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. Selain itu, Manajemen Pelindo tidak melihat adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Perseroan untuk melanjutkan usahanya.

ASUMSI YANG DIGUNAKAN MANAJEMEN UNTUK MELAKUKAN ASESMEN

Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan manajemen dalam melakukan asesmen terhadap kelangsungan usaha adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan sumber daya Pelindo yang unggul untuk berkompetisi dalam industri pelabuhan.
2. Posisi Pelindo dalam industri yang baik dalam kancah regional, yang dapat memberikan kontribusi besar dalam perekonomian negara.
3. Kondisi keuangan yang baik dengan profitabilitas pencapaian laba konsolidasi periode berjalan tahun 2025 sebesar Rp4,36 triliun.
4. Tingkat kesehatan Perseroan yang berada dalam kategori Sangat Sehat.

KERANGKA GOVERNANSI, PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN ASPEK PERPAJAKAN

Sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pelindo berkomitmen untuk berkontribusi terhadap pembangunan melalui ketaatan dalam pembayaran pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Selama tahun 2025, Perseroan telah mematuhi semua peraturan dan memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pengelolaan pajak di Pelindo dilakukan oleh Group Akuntansi dan Perpajakan, di bawah Direktur Keuangan, yang sekaligus merupakan badan tata kelola tertinggi yang secara resmi meninjau dan menyetujui strategi pajak Perseroan. Sebagai wajib pajak, Perseroan berkomitmen untuk patuh terhadap ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku guna menghindari timbulnya sanksi dan/atau denda perpajakan.

Sebagai salah satu bentuk untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan, pada tahun 2025 Group Akuntansi dan Perpajakan melakukan sosialisasi tentang peraturan-peraturan perpajakan terbaru. Sosialisasi dilakukan secara daring kepada seluruh pekerja, serta melalui media komunikasi Pelindo.

in the future, and does not see any material uncertainties that could give rise to any significant doubt about the Company's business continuity.

ASSUMPTIONS USED BY MANAGEMENT TO CONDUCT THE ASSESSMENT

Several factors that management considers when conducting an assessment of business continuity include the following:

1. Pelindo's superior resource capabilities to compete in the port industry.
2. Pelindo's position in industry is good in the regional arena, and can make a major contribution to the country's economy.
3. Good financial condition by achieving profit for the current period in 2025 of Rp4.36 trillion.
4. The Company's financial health is classified as "Very Healthy.

GOVERNANCE FRAMEWORK, MANAGEMENT AND CONTROL OF TAXATION ASPECTS

As part of a State-Owned Enterprise (SOE), PT Pelabuhan Indonesia (Persero) is committed to contributing to development by complying with tax payments. In 2025, the Company complied with all regulations and fulfilled its tax obligations in accordance with applicable laws and regulations.

Tax management at Pelindo is carried out by the Financial Services and Taxation Group, under the Director of Finance, who is also the highest governance body that officially reviews and approves the Company's tax strategy. As a taxpayer, the Company is committed to complying with the provisions of applicable tax laws to avoid incurring tax sanctions and/or fines.

As a form of increasing tax compliance, in 2025 the Financial Services and Taxation Group organized tax brevet training for all employees working in both financial and non-financial fields and regularly socialized the latest tax regulations. Tax brevet training and socialization was carried out online for all employees, as well as through Pelindo's website and communication media.

Pelindo dalam kegiatan operasionalnya telah menjalankan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik *(Good Corporate Governance)* yang dilakukan secara transparan dan akuntabel khususnya dalam mengelola hak dan kewajiban perpajakannya, hak dan kewajiban perpajakannya dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pelindo in its operational activities has implemented Good Corporate Governance in a transparent and accountable manner, especially for managing its tax rights and obligations, and its tax rights and obligations are carried out in accordance with applicable regulations.

Tabel Kontribusi Kepada Negara
Contribution to the State

(dalam Rupiah)
(in Rupiah)

No.	Jenis Pajak Type of Tax	Tahun 2025 2025	Tahun 2024 2024
A	**Pajak** Taxes		
1.	Pajak Penghasilan (PPh) Income Tax (PPh)	**2.446.567.709.781**	2.933.238.339.697
2.	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Value Added Tax (PPN) and Luxury Goods Sales Tax (PPnBM)	**2.484.855.619.225**	2.327.240.430.918
3.	Bea Masuk/Keluar, Bea dan Cukai, Bea Materai Import/Export Duty, Customs and Excise, Stamp Duty	**4.505.370.000**	4.921.510.000
4.	PBB P3 (Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan) PBB P3 (Plantation, Forestry, Mining)	**-**	-
5.	Pajak Pemerintah Pusat Lainnya (misalnya Pajak Karbon) Other Central Government Taxes (eg Carbon Tax)	**-**	-
6.	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), termasuk PBB P2 (Perkotaan dan Pedesaan) Regional Taxes and Regional Retributions (PDRD), including PBB P2 (Urban and Rural)	**296.719.461.031**	254.160.848.396
	Total Kontribusi Pajak (Total A) Total Tax Contribution (Total A)	**5.232.648.160.037**	**5.519.561.129.011**
B	**Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)** Non-Tax State Revenue (PNBP)		
1.	Dividen Dividends	**1.700.765.839.084**	1.038.470.000.000
2.	PNBP Lainnya Other PNBP	**309.339.669.330**	256.792.791.650
3.	Konsesi Concessions	**736.515.666.467**	653.389.284.173
	Total Kontribusi PNBP (Total B) Total PNBP Contribution (Total B)	**2.746.621.174.881**	**1.948.652.075.823**
	Total Kontribusi kepada Negara (Total A dan B) Total Contribution to the State (Total A and B)	**7.979.269.334.918**	**7.468.213.204.834**

PELINDO
INDONESIA MARITIME GATEWAY

PELINDO
INDONESIA MARITIME GATEWAY

Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

PELINDO
PELINDO
PELINDO
PELINDO

Pencapaian Dalam Penerapan *Corporate Governance*

Achievements In Corporate Governance

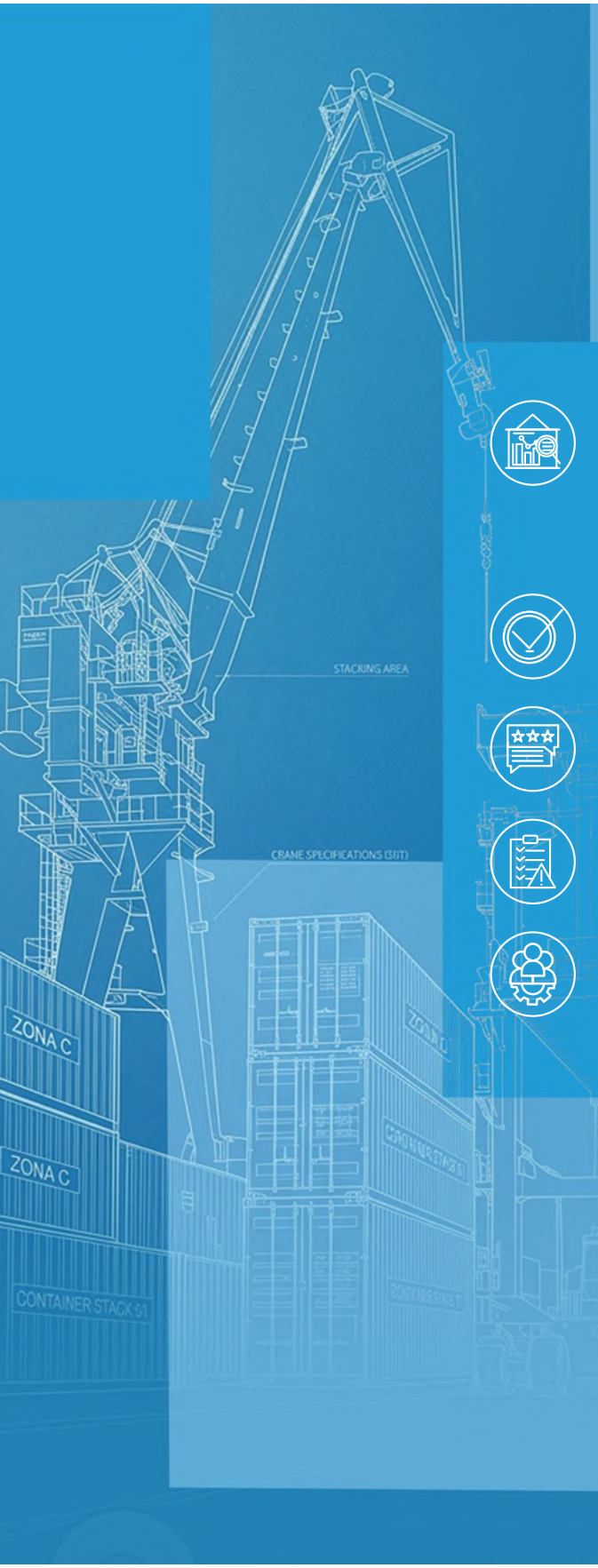

Hasil Assessment GCG dengan predikat The most trusted company oleh The Indonesian Institute of Corporate Governance (IICG) dan Majalah SWA dalam ajang *Corporate Governance Perception Index* (IICG) tahun 2024 yang diselenggarakan pada November 2025
GCG Assessment Results: The Indonesian Institute of Corporate Governance (IICG) and SWA Magazine awarded the title "The Most Trusted Company" in the 2024 Corporate Governance Perception Index (IICG) held in November 2025.

Pengelolaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan Telah tersertifikasi ISO 37001:2016 oleh lembaga British Standard Institution
Anti-Bribery Management System Management has been certified ISO 37001:2016 by the British Standards Institution.

Pelindo Group menggunakan Single Channel Pelaporan Whistle Blowing yang dikelola oleh Pihak ketiga secara Obyektif dan Profesional
Pelindo Group uses a Single Channel for Whistleblowing Reporting, managed objectively and professionally by a third party.

Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas pengelolaan gratifikasi dan WBS Tahun 2025
Monitoring and evaluation of gratification management and the WBS have been conducted in 2025.

Telah dilakukan monitoring atas hasil pengukuran Intenal Control Testing Tahun 2025
Monitoring of Internal Control Testing results has been conducted in 2025.

Dasar Penerapan Corporate Governance

Governance Soft Structure

Dalam menerapkan praktik *Corporate Governance*, Pelindo mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan, dengan uraian sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT).
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tanggal 30 April 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tanggal 25 November 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tanggal 21 April 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Tanggal 25 Oktober 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2021 Tanggal 1 Oktober 2021 Tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I, Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III dan Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV ke Dalam Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II.
7. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-1/MBU/03/2023 Tanggal 03 Maret 2023 Tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
8. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tanggal 03 Maret 2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN.
9. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tanggal 20 Maret 2023 Tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik.

In implementing Corporate Governance practices, Pelindo refers to a number of laws and regulations, with following descriptios:

1. Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (PT).
2. Law of the Republic of Indonesia No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises (SOEs).
3. Law No. 14 of 2008 dated April 30, 2008 concerning Public Information Disclosure.
4. Law No. 19 of 2016 dated November 25, 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 dated April 21, 2008 on Electronic Information and Transactions.
5. Government Regulation No. 45 of 2005 Dated October 25, 2005 Concerning the Establishment, Management, Supervision, and Dissolution of State-Owned Enterprises.
6. Government Regulation No. 101 of 2021 Dated October 1, 2021 concerning the Merger of the Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I, Merger of the Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III and Merger of the Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV into the Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II.
7. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-1/MBU/03/2023 dated March 03, 2023 Regarding Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs of StateOwned Enterprises.
8. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-2/MBU/03/2023 Dated March 03, 2023 Regarding Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of SOEs.
9. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-3/MBU/03/2023 Dated March 20, 2023 Regarding Organs and Human Capital of State-Owned Enterprises.

Struktur dan Mekanisme Corporate Governance
Corporate Governance Mechanism

STRUKTUR ORGAN PERUSAHAAN

GOVERNANCE SOFT STRUCTURE

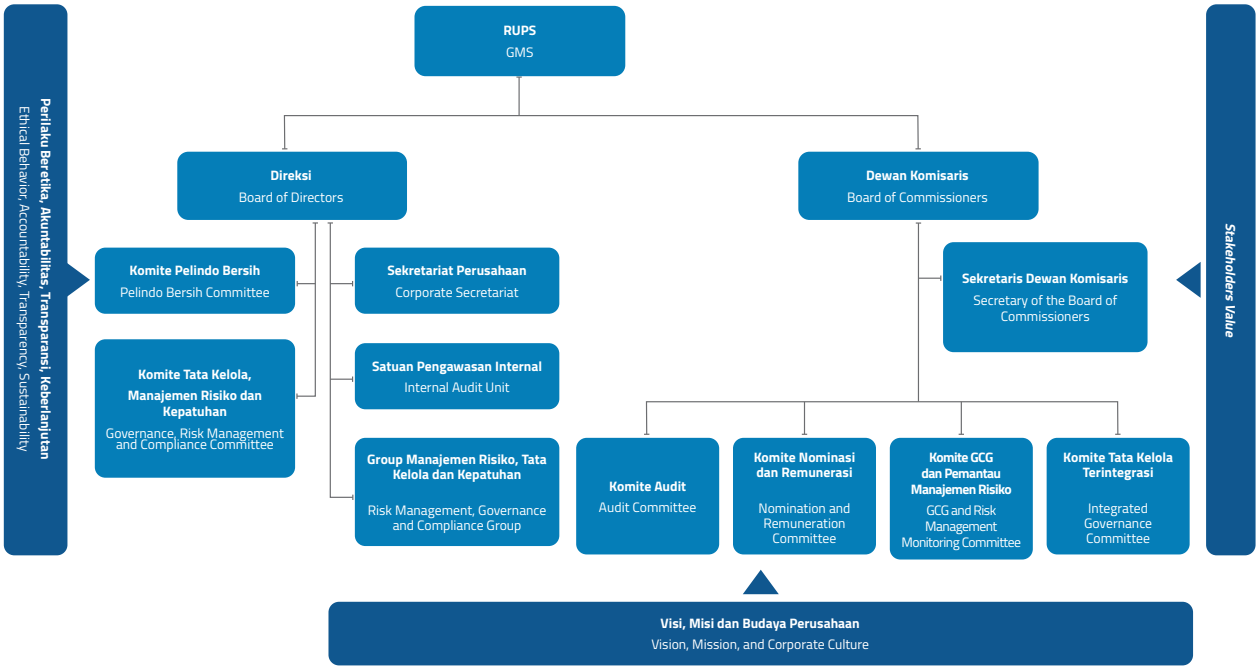

GOVERNANCE SOFT STRUCTURE

Dalam melaksanakan kegiatan Perseroan, Pelindo memiliki berbagai kebijakan/pedoman dalam menjalankan fungsi dan tugasnya yang disebut dengan *governance soft structure*. *Governance soft structure* yang dimiliki Pelindo antara lain sebagai berikut:

1. Anggaran Dasar
2. *Board Manual* Dewan Komisaris dan Direksi
3. *Charter* Komite Audit
4. *Charter* Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko
5. *Charter* Komite Nominasi dan Remunerasi
6. *Charter* Komite Tata Kelola Terintegrasi
7. Pedoman Kode Etik Bisnis
8. Pedoman Pelaksanaan GCG Perusahaan
9. Pedoman *Whistleblowing System*
10. Pedoman Pengendalian Gratifikasi
11. Pedoman Penerapan Tata Kelola Terintegrasi
12. Pedoman Anti *Fraud*
13. Pedoman Benturan Kepentingan
14. Pedoman Tata Kelola Sistem Manajemen Anti Penyuapan

GOVERNANCE SOFT STRUCTURE

In carrying out the Company's activities, Pelindo has various policies/guidelines for executing its functions and duties, which are called the governance soft structure. Pelindo's governance soft structure includes:

1. Articles of Association;
2. Board Manual of Board of Commissioners and Board of Directors;
3. Audit Committee Charter;
4. GCG and Risk Management Monitoring Committee Charter;
5. Nomination and Remuneration Committee Charter;
6. Integrated Governance Committee Charter;
7. Code of Conduct;
8. GCG Code;
9. Whistleblowing System Guidelines;
10. Gratification Control Guidelines;
11. Integrated Governance Guidelines;
12. Anti-Fraud Guidelines;
13. Conflict of Interest Guidelines;
14. Anti-Bribery Management System Governance Guidelines.

MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE

PEMEGANG SAHAM

Saham Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang terdiri dari Saham Seri A Dwiwarna yang hanya khusus dapat dimiliki Negara Republik Indonesia dan Saham Seri B yang dapat dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan/atau masyarakat.

HAK PEMEGANG SAHAM

Perseroan melindungi dan memfasilitasi pelaksanaan hak pemegang saham/pemilik modal yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham/pemilik modal baik Saham Seri A Dwiwarna dan Saham Seri B, yang diantaranya:

1. Hak untuk meminta diselenggarakannya RUPS;
2. Hak untuk meminta informasi tentang mata acara RUPS;
3. Hak untuk mengajukan usul-usul untuk dibahas dalam acara RUPS;
4. Hak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam suatu RUPS, khusus bagi pemegang saham Persero, dengan ketentuan 1 (satu) saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara;
5. Hak untuk mengambil keputusan tertinggi pada Perseroan, khusus bagi pemilik modal Perseroan;
6. Hak untuk memperoleh informasi material mengenai Perseroan, secara tepat waktu, terukur dan teratur;
7. Hak untuk menerima pembagian dari keuntungan BUMN yang diperuntukkan bagi pemegang saham/pemilik modal dalam bentuk dividen, dan sisa kekayaan hasil likuidasi, sebanding dengan jumlah saham/modal yang dimilikinya;
8. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil terhadap pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas;
9. Hak lainnya berdasarkan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di Pelindo dan suatu wadah atau forum bagi para Pemegang Saham untuk mengambil keputusan penting yang kewenangannya tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris sesuai yang ditentukan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan RUPS melalui proses pengumuman dan pemanggilan RUPS yang dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Sejak diterbitkannya pengumuman dan surat pemanggilan pelaksanaan rapat tersebut, seluruh bahan yang akan dibahas dalam RUPS telah tersedia di kantor Pelindo. Dengan demikian, para Pemangku Kepentingan yang menjadi peserta rapat dapat mengambil bahan tersebut.

CORPORATE GOVERNANCE MECHANISM

SHAREHOLDERS

The Company's shares are shares on behalf of and issued on behalf of their owners which are registered in the Shareholders Register consisting of Series A Dwiwarna Shares that can only be owned by the Republic of Indonesia and Series B Shares that can be owned by the Republic of Indonesia and/or the public.

SHAREHOLDER RIGHTS

The Company protects and facilitates the implementation of the rights of shareholders/capital owners whose names are recorded in the register of shareholders/capital owners of both Series A Dwiwarna Shares and Series B Shares, which include:

1. The right to request the holding of GMS;
2. The right to request information about the GMS agenda;
3. The right to submit proposals to be discussed in the GMS agenda;
4. The right to attend and vote in a GMS, specifically for shareholders of Persero, provided that 1 (one) share entitles the holder to cast one vote;
5. The right to make the highest decision in the Company, specifically for the owner of the Company's capital;
6. The right to obtain material information regarding the Company, in a timely, measured and regular manner;
7. The right to receive a share of the SOE's profits allocated to shareholders/capital owners in the form of dividends, and the remaining assets from liquidation, in proportion to the number of shares/capital owned;
8. The right to fair treatment of shareholders, including minority shareholders;
9. Other rights based on the articles of association and provisions of laws and regulations.

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest authority in Pelindo and is a forum where shareholders gather to make important decisions where the authority is not given to Boards of Directors and Board of Commissioners as stipulated in Pelindo's Articles of Association and all applicable laws.

GMS is held through a process of GMS announcement and summons in accordance with applicable regulations. After the announcement and invitation letter for the meeting, all materials to be discussed at the GMS are available at Pelindo's office, so that the Stakeholders who will be participants in the meeting can take the material.

Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. Pemanggilan RUPS dilakukan. Pemanggilan RUPS mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan mata acara disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan. Pada saat pemanggilan RUPS telah disampaikan penjelasan untuk tiap-tiap agenda yang akan mendapat persetujuan Pemegang Saham. Sebelum pelaksanaan RUPS Perseroan menjelaskan tata cara pemungutan suara.

Summons for GMS are made no later than 14 (fourteen) days before the date of GMS holding, excluding the date of the summons and the date of the GMS. The GMS summon includes the date, time, place and agenda accompanied by notification that the material to be discussed at the GMS is available at the Company's office from the date of GMS summons is made until the date of GMS. At the GMS summons, an explanation has been conveyed for each agenda that will be approved by the Shareholders. Prior to the GMS holding, the Company explained the voting procedures.

Keputusan RUPS sah jika semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan bulat. Setelah RUPS selesai maka risalah RUPS mencatat pertanyaan atau tanggapan Pemegang Saham.

A GMS resolution is valid if all shareholders with valid voting rights are present or represented at the GMS and the resolution is unanimously approved. After the GMS is completed, the minutes of GMS record the Shareholders' questions or responses.

Penyelenggaraan RUPS di Perseroan terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. RUPS Tahunan dilakukan Pelindo setiap tahun, yang meliputi RUPS Tahunan tentang Laporan Tahunan dan RUPS Tahunan tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RUPS RKAP). Sedangkan RUPS Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

GMS in the Company consists of Annual GMS and Extraordinary GMS. Annual GMS is held by Pelindo every year, which includes Annual GMS on Annual Report of and Annual GMS on the Company's Work Plan and Budget. While Extraordinary GMS can be held at any time based on the needs and for the benefits of the Company.

PELAKSANAAN RUPS TAHUNAN TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN TAHUN 2025 DAN REALISASINYA

Pelaksanaan RUPS dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Kamis, 23 Januari 2025
Waktu : 12.00 – 13.00 WIB
Tempat : Pelindo Tower Jl. Yos Sudarso No.9, Kec. Koja, Jakarta Utara 14230

ANNUAL GMS ON THE APPROVAL OF 2025 CORPORATE WORK PLAN AND BUDGET AND THE REALIZATION

The GMS was held on:
Day/Date : Thursday, January 23, 2025
Time : 12:00 PM – 1:00 PM WIB
Venue : Pelindo Tower, Jl. Yos Sudarso No. 9, Koja District, North Jakarta 14230

REKAPITULASI KEHADIRAN PADA RUPS TAHUNAN TENTANG PENGESAHAN RKAP TAHUN 2025

RECAPITULATION OF ATTENDANCE AT THE GMS ON 2025 RKAP APPROVAL

No	Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance
1	Desty Arlaini	SVP Business Performance & Asset Optimization Cluster Logistic PT Danantara Asset Management (Persero) selaku penerima kuasa pemegang saham Seri B. SVP of Business Performance & Asset Optimization, Cluster Logistics, PT Danantara Asset Management (Persero), as the authorized representative of Series B shareholders.	Hadir Present
2	Endra Gunawan	Plt. Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik Kementerian BUMN RI Acting Assistant Deputy for Logistics Services, Ministry of SOE, Republic of Indonesia	Hadir Present
3	Arif Suhartono	Direktur Utama President Director	Hadir Present
4	Hambra	Wakil Direktur Utama Vice President Director	Hadir Present

No	Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance
5	Mega Satria	Direktur Keuangan Finance Director	Hadir Present
6	Ihsanuddin Usman	Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Human Capital and General Affairs Director	Hadir Present
7	Prasetyo	Direktur Strategi Strategy Director	Hadir Present
8	Boy Robyanto	Direktur Investasi Investment Director	Hadir Present
9	Putut Sri Muljanto	Direktur Pengelola Managing Director	Hadir Present
10	Agus Suhartono	Komisaris Utama/Komisaris Independen President Commissioner/Independent Commissioner	Hadir Present
11	Suntana	Wakil Komisaris Utama Vice President Commissioner	Hadir Present
12	Heru Sukanto	Komisaris Commissioner	Hadir Present
13	Jodi Mahardi	Komisaris Commissioner	Tidak Hadir Not Present
14	Andus Winarno	Komisaris Commissioner	Hadir Present
15	Elwi Danil	Komisaris Commissioner	Hadir Present
16	Rakhman Fuadhy Kurniawan	Komisaris Independen Independent Commissioner	Hadir Present

PIHAK INDEPENDEN

Pelindo telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Nanda Fauz Iwan dalam menyusun Akta hasil RUPS.

INDEPENDENT PARTY

Pelindo has appointed an independent party, namely Notary Nanda Fauz Iwan, to draw up the GMS Resolution Deed.

KEPUTUSAN DAN REALISASI RUPS TAHUNAN TENTANG PENGESAHAN RKAP TAHUN 2025

RESOLUTION AND REALIZATION OF THE GMS ON 2025 RKAP

Agenda Pertama
First Agenda

Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2025 termasuk Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2025.
Approval of 2025 Company Work Plan and Budget (RKAP) and 2025 Board of Commissioners Work Plan and Budget.

Keputusan:

Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2025 termasuk Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Tahun 2025, dengan pokok-pokok sebagai berikut:

A. Laba (Rugi) Konsolidasian
   - Pendapatan sebesar Rp 33.622.881.228.851,-
   - Laba Usaha sebesar Rp7.049.711.138.149,-
   - EBITDA sebesar Rp11.274.389.640.543,-
   - Laba Bersih sebesar Rp4.017.897.676.543,-
   - Laba Bersih (Atribusi Induk) sebesar Rp3.898.763.669.558,-

B. Posisi Keuangan Konsolidasian
   - Total Aset sebesar Rp122.348.885.835.603,-
   - Ekuitas sebesar Rp52.914.508.362.686,-
   - Interest Bearing Debt sebesar Rp46.753.823.300.967,-

C. Net Operating Cash Flow sebesar Rp13.092.107.257.857,-
D. Capital Expenditure sebesar Rp14.722.839.486.954,-

Status: Telah Terealisasi

Resolution:
To ratify the 2025 Corporate Work Plan and Budget (RKAP), including the 2025 Work Plan and Budget of Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia (Persero), with the following key points:
A. Consolidated Profit (Loss)
   a. Revenue of Rp 33,622,881,228,851
   b. Operating Profit of Rp 7,049,711,138,149
   c. EBITDA of Rp 11,274,389,640,543
   d. Net Profit of Rp 4,017,897,676,543
   e. Net Profit (Attribution to Parent) of Rp 3,898,763,669,558
B. Consolidated Financial Position
   a. Total Assets of Rp 122,348,885,835,603
   b. Equity of Rp52,914,508,362,686.
   c. Interest Bearing Debt of Rp46,753,823,300,967.
C. Net Operating Cash Flow of Rp13,092,107,257,857.
D. Capital Expenditure of Rp14,722,839,486,954.

Status: Realized

Agenda Kedua
Second Agenda

Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA-TJSL) Tahun 2025.
Approval of the 2025 Work Plan and Budget for Social and Environmental Responsibility Program (RKA-TJSL).

Keputusan:
Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA-TJSL) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Tahun 2025 dengan Total Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) sebesar Rp13.442.603.041,- dan *Community Involvement Development* (CID) Non-PUMK sebesar Rp122.037.000.000,-.

Status: Telah Terealisasi

Resolution:
To approve the 2025 Work Plan and Budget for the Social and Environmental Responsibility Program (RKA-TJSL) of PT Pelabuhan Indonesia (Persero), with a total funding of Rp13,442,603,041 for the Micro and Small Enterprises (MSE) Program and Rp122,037,000,000 for Non-MSE Community Involvement Development (CID).

Status: Realized

Agenda Ketiga
Third Agenda

Penetapan Kontrak Manajemen Tahunan yang memuat Target *Key Performance Indicators* (KPI) Direksi secara Kolegial dan Dewan Komisaris Tahun 2025.
Determination of the 2025 Annual Management Contract, which contains collegial Key Performance Indicators of Board of Directors and Board of Commissioners.

Keputusan:

Menetapkan Kontrak Manajemen Tahunan yang memuat Target Key Performance Indicators (KPI) Direksi secara Kolegial dan Dewan Komisaris Tahun 2025, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Resolution:
Determined the 2025 Annual Management Contract, which contains collegial Key Performance Indicators of Board of Directors and Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia (Persero), as attached and is an integral part of this resolution.

Key Performance Indicators Direksi Secara Kolegial Tahun 2025
Key Performance Indicators for Board of Directors Collegially in 2025

No.	Indikator Indicator	ESG	Satuan Unit	Target 2025 2025 Target	Polaritas Polarity	Bobot Weight	
						Sub	Total
A.	**Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia** Economic and Social Value for Indonesia						**55**
Finansial Financial							**14**
1.	EBITDA	C	Rupiah (Miliar) Rupiah (Billion)	11.274	Max	7	
2.	ROIC-WACC	C	%	1,08	Max	7	
Operasional Operational							**27**
3.	Volume Trafik Traffic Volume	C	%	100,00	Max	11	

Key Performance Indicators Direksi Secara Kolegial Tahun 2025
Key Performance Indicators for Board of Directors Collegially in 2025

No.	Indikator Indicator	ESG	Satuan Unit	Target 2025 2025 Target	Polaritas Polarity	Bobot Weight	
						Sub	Total
4.	Capaian Produktivitas Productivity Achievements	C	%	100,00	Max	11	
5.	*Lost Time Injury Frequency Rate* (LTIFR)	S	Skor Score	0,93	Min	5	
Sosial Social							**14**
6.	*Net Promotor Score* (NPS) Net Promotor Score (NPS)	S	%	40,00	Max	7	
7.	ESG *Rating*	G	%	100,00	Max	7	
B.	**Inovasi Model Bisnis** Business Model Innovation						**15**
8.	Penyelesaian Pemurnian Bisnis Business Refinement Settlement	C	%	100,00	Max	5	
9.	Additional MEPS Offering Additional MEPS Offering	C	Jumlah Amount	4,00	Max	5	
10.	Number of KRI Exceeding Its Risk Tolerance Number of KRI Exceeding Its Risk Tolerance	G	%	25,00	Min	5	
C.	**Kepemimpinan Teknologi** Technology Leadership						**13**
11.	Average Schedule Variance for Key Projects: Standarisasi dan Digitalisasi Layanan Petikemas, Layanan Non Petikemas, dan Layanan Marine Average Schedule Variance for Key Projects: Standardization and Digitalization of Container Services, Non-Container Services, and Marine Services	C	%	100,00	Max	7	
12.	Implementasi Sinergi dan Integrasi Logistik dalam Ekosistem BUMN Implementation of Logistics Synergy and Integration in SOE Ecosystem	C	%	100,00	Max	6	
D.	**Peningkatan Investasi** Increased Investment						**12**
13.	Pengembangan Infrastruktur dan Peralatan Pelabuhan Port Infrastructure and Equipment Development	E	%	100,00	Max	7	
14.	Realisasi PMN State Capital Investment (PMN) Realization	S	%	100,00	Max	5	
E.	**Pengembangan Talenta** Talent Development						**5**
15.	*Human Capital Transformation*	S	%	100,00	Max	5	
Total							**100**

Key Performance Indicators PMN
PMN Key Performance Indicators

No.	KPI	Satuan Unit	Target RKAP RKAP Target	Polaritas Polarity	Proporsi Proportion
1	Akumulasi Progress Proyek Pengerukan dan Dinding Penahan Tanah (Reventment Wall) Accumulated Progress of the Dredging and Retaining Wall Project	%	100	Maximize	15
2	Akumulasi Penyerapan Dana PMN Accumulated State Capital Investment Fund Absorption	%	100	Maximize	15

Key Performance Indicators PMN
PMN Key Performance Indicators

No.	KPI	Satuan Unit	Target RKAP RKAP Target	Polaritas Polarity	Proporsi Proportion
Outcome					
3	Jumlah Kunjungan Kapal Cruise Number of Cruise Ship Visits	Call	63	Maximize	20
4	Penyerapan mitra UMKM Absorption of MSME Partners	Unit Stand	100	Maximize	20
5	Kontribusi Pendapatan BMTH BMTH Revenue Contribution	Rp Miliar Rp Billion	142,49	Maximize	15
6	Jumlah Wisatawan Luar Negeri Number of Foreign Tourists	Orang People	63.000	Maximize	15
Total					**100**

Key Performance Indicators (KPI) Dewan Komisaris
Board of Commissioners Key Performance Indicators (KPI)

No.	Indikator Pencapaian Kinerja Performance Achievement Indicators	Satuan Unit	Bobot Weight	Target
1.	Kontribusi terhadap capaian kinerja perusahaan Contribution to the Company's performance achievements		10	
	Kontribusi terhadap realisasi capaian KPI Direksi Contribution to the realization of Board of Directors' KPI achievements	Poin Points	10	100
2.	Ketepatan waktu penyampaian Pendapat dan Saran yang menjadi kewajiban Dewan Komisaris Timeliness in delivering opinions and recommendations, which constitute the responsibilities of Board of Commissioners.		20	
	a. Pendapat dan Saran Dewan Komisaris atas RKAP 2025, Laporan Triwulanan 2025, dan Laporan Tahunan 2024 Opinions and Recommendations of Board of Commissioners on the 2025 Work Plan and Budget (RKAP), 2025 Quarterly Report, and 2024 Annual Report	Hari Kerja Working days	5	30
	b. Tanggapan atas tindakan Direksi yang harus mendapat persetujuan RUPS/ Menteri Responses to Board of Directors' actions that require GMS/Ministerial approval	Hari Kerja Working days	5	14
	c. Tanggapan atas tindakan Direksi yang harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris Responses to Board of Directors' actions that require Board of Commissioners' approval	Hari Kerja Working days	5	14
	d. Laporan Dewan Komisaris triwulanan dan Tahunan Quarterly and Annual Reports of Board of Commissioners	Hari Kerja Working days	5	30
3.	Rapat dan Kunjungan Kerja Dewan Komisaris Board of Commissioners Meeting and Working Visit		18	
	a. Jumlah Rapat Internal Dewan Komisaris Number of Internal Meetings of Board of Commissioners	Jumlah Amount	6	12
	b. Jumlah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Number of Meetings of Board of Commissioners and Board of Directors	Jumlah Amount	6	12
	c. Kunjungan Kerja Dewan Komisaris ke Cabang Board of Commissioners Working Visits to Branches	Jumlah Amount	6	7
4.	Pengawasan dan arahan terhadap Direksi atas rencana dan kebijakan Perusahaan Supervision and direction of Board of Directors regarding Company plans and policies	Jumlah Amount	18	7
5.	Efektivitas Kegiatan Penunjang Dewan Komisaris Effectiveness of Board of Commissioners' Supporting Activities		30	
	Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris Competency Enhancement of Board of Commissioners			
	Pengembangan kompetensi Dewan Komisaris Development of Board of Commissioners' Competency	Pelaksanaan Implementation	8	4

Key Performance Indicators (KPI) Dewan Komisaris
Board of Commissioners Key Performance Indicators (KPI)

No.	Indikator Pencapaian Kinerja Performance Achievement Indicators	Satuan Unit	Bobot Weight	Target
	Efektivitas Organ Pendukung Effectiveness of Supporting Organs			
	Komite Audit Audit Committee			
	Pelaksanaan Rapat Internal Komite Audit Implementation of Internal Audit Committee Meetings	Jumlah Amount	3	12
	Laporan Penugasan Komite Audit Audit Committee Assignment Report	Laporan Report	3	4
	Komite Manajemen Risiko Risk Management Committee			
	Pelaksanaan Rapat Internal Komite PMR Implementation of Internal Audit Committee Meetings	Jumlah Amount	3	12
	Laporan Penugasan Komite PMR PMR Committee Assignment Report	Laporan Report	3	4
	Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee			
	Pelaksanaan Rapat Internal Komite NR Implementation of Internal Audit Committee Meetings	Jumlah Amount	3	12
	Laporan Penugasan Komite NR NR Committee Assignment Report	Laporan Report	3	4
	Komite Tata Kelola Terintegrasi Integrated Governance Committee			
	Pelaksanaan Rapat Komite TKT Implementation of Integrated Corporate Governance Committee Meetings	Jumlah Amount	4	4
6.	Pengawasan dan Arahan atas Rencana dan Pelaksanaan Program TJSL Supervision and Direction of the Planning and Implementation of CSR Program	Jumlah Amount	2	2
	Jumlah Total		**100**	

Status: Telah Terealisasi
Status: Realized

Agenda Keempat
Fourth Agenda

Persetujuan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan apabila terdapat tindakan-tindakan yang mengakibatkan perubahan alokasi anggaran investasi dengan nilai maksimum 10% (sepuluh persen) dari nilai masing-masing program investasi sepanjang tidak mengubah total nilai investasi.
Approval of the delegation of authority to the Board of Commissioners to provide approval if there are actions that result in changes to the investment budget allocation with a maximum value of 10% (ten percent) of the value of each investment program, provided that the total investment value is not changed.

Keputusan:

Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan apabila terdapat tindakan-tindakan yang mengakibatkan perubahan alokasi anggaran investasi dengan nilai maksimum 10% (sepuluh persen) dari nilai masing-masing program investasi sepanjang tidak mengubah total nilai investasi.

Status: Telah Terealisasi

Decision:

To approve the delegation of authority to the Board of Commissioners to grant approval for actions resulting in changes to the investment budget allocation with a maximum value of 10% (ten percent) of the value of each investment program, provided that the total investment value is not changed.

Status: Realized

TINDAK LANJUT ARAHAN PEMEGANG SAHAM RUPS RKAP TAHUN 2025

FOLLOW-UP ON SHAREHOLDERS' DIRECTIVES IN THE 2025 GMS RKAP

No.	Arahan Directions	Tindak Lanjut Follow-Up
1	Melanjutkan transformasi Pelindo dengan 3 (area) penting yang perlu menjadi perhatian yaitu mendorong Pelindo menjadi pemain global yang bisa mengambil flow transshipment global, meningkatkan peran Pelindo dalam logistik Nasional sehingga kotribusi Pelindo dalam cost domestik semakin baik, dan menciptakan infrastruktur-infrastruktur multi moda yang berskala global Continuing Pelindo's transformation, focusing on three key areas: empowering Pelindo to become a global player capable of capturing global transshipment flows, enhancing Pelindo's role in national logistics to improve its contribution to domestic costs, and creating global-scale multimodal infrastructure.	1. Saat ini sedang disusun kajian terkait dengan peningkatan konektivitas Pelabuhan Indonesia dengan Global oleh SPTP, yang salah satunya mengidentifikasi peluang Pelindo untuk bisa compete dalam kontestasi market transshipment internasional. 2. Sedang dilakukan penyusunan Kajian Roadmap Transformasi Pelindo 2025-2045 yang mengakomodir berbagai key initiative pada jangka panjang sehingga dapat mendukung peningkatan peran Pelindo dalam logistik Nasional khususnya dalam Ekosistem Maritim, diantaranya: 1) Peningkatan konektivitas global & mengkapitalisasi jalur maritim internasional, 2) Peningkatan layanan pelabuhan yang terintegrasi dan berkinerja tinggi, serta 3) Membangun kawasan logistik terintegrasi berbasis pelabuhan. 1. A study is currently being prepared by the Ports and Ports Authority (SPTP) to improve connectivity between Indonesian ports and the global market. One of the objectives is to identify Pelindo's opportunities to compete in the international transshipment market. 2. A Pelindo Transformation Roadmap Study for 2025-2045 is being prepared, which incorporates various long-term key initiatives to support Pelindo's growing role in national logistics, particularly within the Maritime Ecosystem. These include: 1) Improving global connectivity and capitalizing on international maritime routes, 2) Improving integrated and high-performance port services, and 3) Building a port-based integrated logistics area.
2	Melakukan persiapan dengan mengambil langkah-langkah strategis, termasuk menyiapkan dan menyusun kajian implementasi integrasi ekosistem maritim dalam rangka transformasi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) sebagai pemimpin ekosisitem maritim terintegrasi dan berkelas dunia Conducting preparations by taking strategic steps, including preparing and compiling a study on the implementation of maritime ecosystem integration, as part of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)'s transformation into a world-class, integrated maritime ecosystem leader.	Dalam rangka menindaklanjuti Surat Kementerian BUMN Nomor: S-48/MBU/Wk.K/02/2025 tanggal 20 Februari 2025 tentang Rencana Integrasi Ekosistem Maritim kepada Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), dan Direksi PT PELNI (Persero), saat ini sedang dilakukan pembentukan tim dan penyusunan kajian bersama terkait Rencana Integrasi Ekosistem Maritim. In response to the Ministry of State-Owned Enterprises' Letter No. S-48/MBU/Wk.K/02/2025 dated February 20, 2025, concerning the Maritime Ecosystem Integration Plan to the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero), PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), and PT PELNI (Persero), a team is being formed and a joint study is being prepared regarding the Maritime Ecosystem Integration Plan.
3	Meningkatkan konektivitas antarwilayah dengan mendukung konsep hub and spoke serta mengintegrasikan Pelabuhan dengan kawasan industri dan logistik melalui penyiapan Pelabuhan-Pelabuhan yang sesuai dengan kebutuhan pelayaran Improving interregional connectivity by supporting the hub and spoke concept and integrating ports with industrial and logistics areas by developing ports tailored to shipping needs.	Subholding PT Pelindo Terminal Petikemas sesuai amanat Buku Putih merger serta RJPP tengah berupaya menjalankan Inisiatif Strategis Pengembangan Hub and Spoke untuk mendukung konektivitas nasional, yang saat ini menganalisa opsi konsolidasi di Indonesia Timur di Hub dan Sub Hub di beberapa lokasi Indonesia Timur diantaranya Makasar, Ambon, dsb. Adapun untuk mewujudkan Inisiatif ini memerlukan berbagai pre requisite dukungan seperti kerjasama dengan Pelayaran dan dukungan dari Pemerintah. In accordance with the mandate of the merger White Paper and the Long-Term Development Plan (RJPP), the subholding of PT Pelindo Terminal Petikemas is implementing the Hub and Spoke Development Strategic Initiative to support national connectivity. It is currently analyzing consolidation options in Eastern Indonesia, including hubs and subhubs in several locations in Eastern Indonesia, including Makassar, Ambon, and others. Realizing this initiative requires various prerequisites, such as collaboration with shipping companies and government support.

No.	Arahan Directions	Tindak Lanjut Follow-Up
4	Meningkatkan kualitas operasional dan layanan, serta menginisiasi ekspansi bisnis kepelabuhanan dan logistik melalui kerjasama dengan mitra strategis serta perluasan bisnis Subholding dan anak perusahaan untuk memperkuat posisi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) sebagai operator Pelabuhan berkelas dunia Improving operational and service quality, and initiating port and logistics business expansion through collaboration with strategic partners and the expansion of subholdings and subsidiaries to strengthen PT Pelabuhan Indonesia (Persero)'s position as a world-class port operator.	Dalam meningkatkan kualitas layanan operasional, telah dilakukan standardisasi pelayanan kapal di 76 cabang sampai dengan Tw 1 Tahun 2025. Selanjutnya, proses standardisasi pelayanan kapal akan dilanjutkan pada pelayanan kapal di beberapa perairan pelimpahan dalam lingkup SPJM Group. Untuk pelayanan terminal, telah standardisasi di 47 cabang/terminal non petikemas sampai dengan TW 1 Tahun 2025. Selain itu, telah disusun roadmap untuk peningkatan status dermaga menjadi dedicated area pada 18 terminal. To improve operational service quality, vessel service standardization has been implemented at 76 branches by Q1 2025. Furthermore, the standardization process will continue for vessel services in several waterways within SPJM Group. For terminal services, standardization has been implemented at 47 branches/non-container terminals by Q1 2025. Furthermore, a roadmap has been developed to upgrade the status of docks to dedicated areas at 18 terminals.
5	Melaksanakan langkah-langkah antisipasi dan mitigasi atas meningkatnya persaingan pada lini bisnis PT Pelabuhan Indonesia (Persero) seperti keberadaan TUKS yang beralih menjadi Terminal umum sementara, pergeseran dari kapal petikemas menjadi menggunakan kapal RoRO dan bisnis pelayanan pandu tunda yang bersaing dengan BUP lain Implementing anticipatory and mitigating measures to address increased competition in PT Pelabuhan Indonesia (Persero)'s business lines, such as the conversion of TUKS to temporary general terminals, the shift from container ships to RoRO vessels, and the tugboat pilotage service business, which competes with other Port Authority Business Entities (BUPs).	1. Terhadap keberadaan TUKS telah dikirimkan surat ke Kemenhub dan telah melakukan transformasi dalam upaya peningkatan layanan seperti pengelolaan dan pemeliharaan alat pendukung kegiatan bongkar muat, meningkatkan kualitas SDM, memperbaiki infrastruktur utama, mengimplementasikan sistem operasi secara real time yang dapat di akses pengguna jasa; 2. Dalam peralihan dari Petikemas ke Roro, adanya penyesuaian tarif dan perbaikan layanan petikemas; 3. Terkait Pelayanan Pemanduan dan Penundaan, dilakukan perluasan wilayah pemanduan dan penundaan, serta peningkatan layanan melalui transformasi pelabuhan. 1. Regarding the existence of TUKS, a letter has been submitted to the Ministry of Transportation (Kemenhub), and transformation efforts have been carried out to improve services, including the management and maintenance of cargo handling supporting equipment, improving the quality of human resources, upgrading key infrastructure, and implementing a real-time operational system that can be accessed by service users. 2. In the transition from container to RoRo services, tariff adjustments have been made along with improvements in container service quality. 3. Regarding pilotage and towage services, the pilotage and towage service areas have been expanded, and service quality has been improved through
6	Meningkatkan kontribusi value creation berupa revenue enhancement/ growth atas inisiatif strategis pasca penggabungan sehingga dapat menghasilkan value creation yang berkelanjutan Increasing value creation contributions through revenue enhancement/growth through post-merger strategic initiatives to generate sustainable value creation.	Per Desember 2024, telah terealisasi value creation sebesar Rp 5,440 milyar dari target Rp 6,077 milyar atau 90% dari target melalui cost efficiency dan revenue enhancement. Beberapa inisiatif strategis yang menjadi kontributor terbesar value creation diantaranya Penurunan/optimalisasi financing cost sebesar Rp 2,655 miliar, Pengadaan bersama / terpusat sebesar Rp 480 miliar, Pembentukan klaster dan model Bisnis sebesar Rp 425 miliar dan Pengembangan potensi pelabuhan melalui sinergi investasi dengan strategic partners (e.g. INA) sebesar Rp 411 miliar. Pelindo akan tetap melanjutkan navigasi dan monitoring terhadap progres program kerja strategis dan pencapaian value creation sebagaimana target yang telah ditetapkan, utamanya terhadap program yang berkaitan dengan ekspansi bisnis. As of December 2024, value creation of Rp5,440 billion has been realized, out of a target of Rp6,077 billion, or 90% of the target through cost efficiency and revenue enhancement. Several strategic initiatives that contributed the most to value creation include reducing/optimizing financing costs by Rp2,655 billion, joint/centralized procurement of Rp480 billion, establishing clusters and business models of Rp425 billion, and developing port potential through investment synergies with strategic partners (e.g., INA) of Rp411 billion. Pelindo will continue to navigate and monitor the progress of strategic work programs and the achievement of value creation targets, particularly those related to business expansion.

No.	Arahan Directions	Tindak Lanjut Follow-Up
7	Melakukan evaluasi dan upaya kontrol atas biaya-biaya operasional yang berada dalam kendali manajemen termasuk diantarannya beban SDPK, dengan standarisasi digitalisasi dan sistemasi layanan operasional Pelabuhan yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan, efisiensi waktu dan biaya Evaluate and control operational costs under management control, including SDMK expenses, by standardizing digitalization and systematizing port operational services to improve service quality, time efficiency, and cost efficiency.	Sudah disusun melalui program efisiensi biaya tahun 2025 untuk mengendalikan beban-beban dengan target efisiensi tahun 2025 sebesar Rp 119 miliar dengan 10 tema efisiensi yakni Optimasi Beban Bahan Bakar, Optimasi Kontrak Kerjasama Operasi, Sewa dan Penunjang Operasi,Pengadaan Bersama,Efisiensi Beban Pemeliharaan, Optimasi Pemanfaatan Teknologi dan Informasi,Efisiensi Beban langganan Listrik, Air dan Telepon,Optimasi Beban SDM, Efisiensi Beban Administrasi dan Umum, Efisiensi Beban Konsultan dan Efisiensi Beban Keuangan A cost efficiency program has been developed for 2025 to control expenses, with a 2025 efficiency target of Rp119 billion. These 10 efficiency themes include: Fuel Cost Optimization, Operational Cooperation Contract Optimization, Lease and Operational Support, Joint Procurement, Maintenance Cost Efficiency, Technology and Information Utilization Optimization, Electricity, Water, and Telephone Subscription Cost Efficiency, Human Resources Cost Optimization, Administration and General Cost Efficiency, Consultant Cost Efficiency, and Financial Cost Efficiency.
8	Menyusun strategi yang komprehensif termasuk mitigasi risiko dalam mengoptimalkan kinerja CTP melalui integrasi dan/atau restrukturisasi keuangan, salah satunya melalui integrasi tol JTCC dengan JORR-1 Develop a comprehensive strategy, including risk mitigation, to optimize CTP performance through financial integration and/or restructuring, including the integration of JTCC toll road with JORR-1 toll road.	Subholding PT Pelindo Solusi Logistik beserta anak perusahaanya (PT Akses Pelabuhan Indonesia) sudah merencanakan mitigasi risiko melalui 2 program besar yakni : 1. Integrasi JTCC dengan Jaringan Tol Jabodetabek. Saat ini sedang dalam tahap Penyusunan Kajian Integrasi Tarif JTCC dengan Jaringan Tol Jabodetabek serta Usulan Integrasi Tarif JTCC dengan Jaringan Tol Jabodetabek kepada BUJT terkait dan Kementrian PU (surat tertanggal 7 Maret 2025 kepada Menteri Pekerjaan Umum RI). 2. Pengembangan Rest Area dan Logistic Hub di JTCC. Saat ini sedang dalam tahap evaluasi proposal kerjasama dari calon mitra untuk pengembangan Rest Area & Logistic Hub. The subholding company, PT Pelindo Solusi Logistik, and its subsidiary (PT Akses Pelabuhan Indonesia), have planned risk mitigation through two major programs: 1. Integration of JTCC with Jabodetabek Toll Road Network. Currently, a study is being prepared on the integration of JTCC tariffs with Jabodetabek Toll Road Network and a proposal for JTCC tariff integration with Jabodetabek Toll Road Network to the relevant BUJT (Business Enterprises) and the Ministry of Public Works (letter dated March 7, 2025, to the Minister of Public Works). 2. Development of Rest Area and Logistics Hub at JTCC. Currently in the evaluation stage of cooperation proposals from potential partners for the development of Rest Area & Logistics Hub.
9	Mengoptimalkan pendanaan dan investasi untuk pengembangan infrastuktur dan peralatan Pelabuhan yang bersifat strategis dan menciptakan value creation untuk memaksimalkan produktivitas dan standar kualitas operasional, serta melakukan prioritisasi sehingga Capex menjadi lebih efisien utamanya untuk menyeimbangkan arus kas Optimizing funding and investment for the development of strategic port infrastructure and equipment and creating value to maximize productivity and operational quality standards, as well as prioritizing to ensure more efficient capital expenditure (CapEx), particularly to balance cash flow.	Telah dilakukan penyelarasan pelaksanaan investasi dengan anggaran investasi tahun berjalan agar setiap investasi tidak melebihi kebutuhan dana serta memprioritaskan investasi yang meningkatkan pendapatan level of revenue, selain itu manajemen memastikan bahwa pelaksanaan investasi telah menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, melakukan mitigasi risiko yang tepat guna, termasuk langkah preventif dan responsif dalam menghadapi potensi risiko yang mungkin terjadi sepanjang proses pelaksanaan investasi serta mematuhi prosedur dan ketentuan yang berlaku Investment implementation has been aligned with the current year's investment budget to ensure that each investment does not exceed funding requirements and prioritizes investments that increase revenue. Furthermore, management ensures that investment implementation adheres to good corporate governance principles, implements appropriate risk mitigation, including preventive and responsive measures to address potential risks that may arise throughout the investment process, and complies with applicable procedures and regulations.
10	Memprioritaskan percepatan penyelesaian proyek investasi yang bersifat strategis khususnya proyek yang termasuk proyek strategis Nasional dan Penyertaan Modal Negara (PMN) sesuai dengan target pada tahun 2025 (dua ribu dua pulih lima) Prioritizing the acceleration of strategic investment projects, particularly those included in National Strategic Projects and State Capital Participation (PMN), in accordance with the 2025 target.	Terkait percepatan penyelesaian proyek investasi, saat ini telah dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap bulannya bersama dengan unit pengelola proyek, regional dan subholding PT Pelindo. Regarding the acceleration of investment project completion, regular monthly monitoring and evaluation are currently being conducted in conjunction with the project management unit, regional units, and subholdings of PT Pelindo.

No.	Arahan Directions	Tindak Lanjut Follow-Up
11	Melakukan evaluasi atas kinerja dan mengoptimalkan skema komersialisasi dengan mitra strategis serta strategi pemasaran yang efektif dalam pengelolaan Pelabuhan-Pelabuhan baru seperti Bali Maritime Tourism Hub, Kijing, Kuala Tanjung dan Makassar New Port Evaluating performance and optimizing commercialization schemes with strategic partners and implementing effective marketing strategies in the management of new ports such as Bali Maritime Tourism Hub, Kijing, Kuala Tanjung, and Makassar New Port.	Telah dilakukan beberapa action plan dalam rangka komersialisasi di beberapa proyek strategis, diantaranya: 1. Telah dilakukan perikatan kerja sama antara Anak Usaha (Subholding) Pelindo dengan Mitra Strategis terkait Pengembangan dan pengoperasian baik dari sisi Terminal/Pelabuhan ataupun dari sisi area (kawasan) pendukiung terminal 2. Telah dilakukan serah operasi bisnis kepada Anak Usaha (Subholding) Pelindo terkait pengembangan dan pengoperasian terminal/pelabuhan yang terintegrasi dengan kawasan pendukung 3. Sedang dilakukan Kajian (Pre-Studi) Pemilihan Mitra Strategis ataupun Studi Re-Masterplanning untuk proyek strategis lainnya, seperti Kuala Tanjung dan Makassar New Port Several action plans have been implemented for the commercialization of several strategic projects, including: 1. A cooperation agreement has been signed between Pelindo's Subholdings and Strategic Partners regarding the development and operation of both the Terminal/Port and the terminal's supporting areas. 2. The handover of business operations to Pelindo's Subholdings regarding the development and operation of terminals/ports integrated with supporting areas. 3. Pre-studies for the selection of Strategic Partners and re-masterplanning studies are currently underway for other strategic projects, such as Kuala Tanjung and Makassar New Port.
12	Menyelesaikan rangkaian aksi-aksi korporasi pemurnian bisnis sebagaimana yang telah di tetapkan, dengan tetap memperhatikan kualitas tata kelola melalui kajian yang menyeluruh Complete a series of corporate actions to refine the business as stipulated, while still paying attention to the quality of governance through a comprehensive review.	Dilakukan percepatan penyelesaian aksi korporasi pemurnian bisnis melalui peningkatan intensitas koordinasi dan monitoring berkala melalui rapat teknis dan rapat rutin Biweekly Meeting Pemurnian Bisnis untuk mengawal progress dan penyelesaian kendala yang dihadapi baik oleh entitas terkait maupun antar Subholding. The completion of corporate actions for business refinement is being accelerated by increasing coordination and regular monitoring through technical meetings and regular biweekly Business Refinement Meetings to monitor progress and resolve obstacles faced by both related entities and between Subholdings.
13	Secara konsisten mengadopsi langkah-langkah perluasan implementasi energi ramah lingkungan sebagaimana Surat Menteri BUMN Nomor:S-333/MBU/06/2024 tanggal 24-06-2024 (Dua puluh empat Juni dua ribu dua puluh empat) perihal Pedoman Perencanaan Strategis Badan Usaha Milik Negara Tahun 2024-2034 (dua ribu dua puluh empat sampai dengan dua eibu tiga puluh empat) dalam penerapan ekosistem pelabuhan yang berkelanjutan Consistently adopt measures to expand the implementation of environmentally friendly energy as stated in the Letter of the Minister of State-Owned Enterprises Number: S-333/MBU/06/2024 dated June 24, 2024 (June 24, 2024) concerning the Strategic Planning Guidelines for State-Owned Enterprises for 2024-2034 (two thousand twenty-four to two thousand thirty-four) in implementing a sustainable port ecosystem.	Untuk mendukung output 2034 KBUMN khususnya Global Carbon Trading Hub, telah disusun ESG Roadmap Pelindo tahun 2025-2030 dan saat ini sedang dilakukan upaya implementasi atas roadmap tersebut salah satunya dalam hal pengurangan emisi scope 1 dan 2 oleh Pelindo. To support the 2034 KBUMN output, specifically the Global Carbon Trading Hub, Pelindo has prepared an ESG Roadmap for 2025-2030. Implementation efforts are currently underway, including reducing emissions from Scopes 1 and 2.
14	RKAP yang disahkan merupakan pedoman bagi Direksi dalam menjalankan kegiatan usaha dan pedoman bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan perusahaan termasuk atas komitmen untuk mencapai target-target RKAP 2025 (dua ribu dua puluh lima) dan Key Performance Indicators (KPI) tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima). RKAP tersebut agar dirinci menjadi program dan target bulanan dan triwulanan untuk memudahkan monitoring dan evaluasi pencapaiannya, dan dilakukan cascading ke seluruh jajaran Perusahaan, serta dalam pelaksanaannya senantiasa berpedoman pada prinsip Good Corporate Governance (GCG) The ratified RKAP serves as a guideline for the Board of Directors in carrying out business activities and a guideline for the Board of Commissioners in carrying out company oversight duties, including the commitment to achieving the RKAP targets for 2025 (two thousand twenty-five) and Key Performance Indicators (KPI) for 2025 (two thousand twenty-five). The RKAP should be detailed into monthly and quarterly programs and targets to facilitate monitoring and evaluation of its achievements, and be cascaded to all levels of the Company, and in its implementation always be guided by the principles of Good Corporate Governance (GCG).	KPI Kolegial PT Pelabuhan Indonesia (Persero) telah disusun berdasarkah arahan yang tertuang pada Aspirasi Pemegang Saham/Menteri untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2025 pada Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor S-468/MBU/09/2024 tanggal 30 September 2024. Target yang tertuang dalam KPI Kolegial 2025 juga sejalan dengan target yang telah ditetapkan pada RKAP 2025. KPI telah disahkan dalam kontrak manajemen yang ditandatangani oleh Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham PT Pelabuhan Indonesia (Persero). The Collegial KPIs of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) have been developed based on the directives contained in the Shareholder/Ministerial Aspirations for the preparation of the 2025 Company Work Plan and Budget, as stated in the Letter of the Minister of State-Owned Enterprises No. S-468/MBU/09/2024 dated September 30, 2024. The targets set forth in the 2025 Collegial KPIs are also in line with the targets set in the 2025 Work Plan and Budget (RKAP). The KPIs have been ratified in a management contract signed by the Board of Directors, Board of Commissioners, and Shareholders of PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

No.	Arahan Directions	Tindak Lanjut Follow-Up
15	Direksi agar menindaklanjuti dan menyelesaikan secara tuntas temuan, serta saran dan rekomendasi auditor, baik auditor eksternal (BPK RI dan/atau KAP) maupun auditor Internal (SPI) di tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) maupun tahun- tahun sebelumnya. Tindak lanjut penyelesaian temuan/saran auditor agar dibahas secara komprehensif dengan Dewan Komisaris dan dilaporkan secara tertulis kepada pemegang saham The Board of Directors shall follow up and thoroughly resolve the findings, suggestions, and recommendations of auditors, both external auditors (BPK RI and/or KAP) and internal auditors (SPI) in 2024 (two thousand twenty-four) and in previous years. Follow-up on the resolution of auditor findings/suggestions must be discussed comprehensively with the Board of Commissioners and reported in writing to shareholders.	Target penyelesaian temuan audit internal dan eksternal pada tahun 2024 sebesar 75% dan terealisasi sebesar 81%. Pada tahun 2025 target 80% dan akan terus dilakukan percepatan atas tindak lanjut penyelesaian temuan audit internal dan ekternal The target for resolving internal and external audit findings in 2024 was 75%, with 81% achieved. The target for 2025 is 80%, and follow-up on internal and external audit findings will continue to be accelerated.
16	Menyampaikan laporan tahunan perseroan termasuk laporan keuangan tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang telah di audit oleh kantor akuntan publik selambat-lambatnya tanggal 15-04-2025 (lima belas april dua ribu dua puluh lima) dan melakukan audit upon procedure (AUP) melalui sistem informasi manajemen kementerian BUMN paling lambat dua minggu setelah audit rilis Submit the company's annual report, including the financial statements for the 2024 (two thousand twenty-four) fiscal year audited by a public accounting firm, no later than April 15, 2025 (the fifteenth of April, two thousand twenty-five), and conduct an audit upon procedure (AUP) through the Ministry of State-Owned Enterprises' management information system no later than two weeks after the audit is released.	Laporan keuangan auditan tahun buku 2024 telah rilis di tanggal 24 Maret 2025 dan telah diupload serta telah mengupdate saldo sesuai saldo Audited di web sistem informasi manajemen kementrian BUMN The audited financial statements for the 2024 fiscal year was released on March 24, 2025, and has been uploaded and the balances updated according to the audited balances on the Ministry of State-Owned Enterprises' management information system website.

PELAKSANAAN RUPS TAHUNAN TENTANG PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN TAHUN BUKU 2024 DAN REALISASINYA

Pelaksanaan RUPS dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Selasa, 24 Juni 2025
Waktu : 10.00 – 12.00 WIB
Tempat : Hotel Borobudur Jakarta, Ruangan Singosari Lt. 1, Jalan Lapangan Banteng Selatan No. 1 Jakarta Pusat

ANNUAL GMS ON APPROVAL OF FISCAL YEAR 2024 ANNUAL REPORT AND THE REALIZATION

The GMS was held on:
Day/Date: Tuesday, June 24, 2025
Time: 10:00 AM – 12:00 PM WIB
Venue: Hotel Borobudur Jakarta, Singosari Room, 1st Floor, Jalan Lapangan Banteng Selatan No. 1, Central Jakarta

REKAPITULASI KEHADIRAN PADA RUPS TAHUNAN TENTANG PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN TAHUN BUKU 2024

RECAPITULATION OF ATTENDANCE AT THE ANNUAL GMS ON APPROVAL OF FISCAL YEAR 2024 ANNUAL REPORT AND THE REALIZATION

No	Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance
1	Desty Arlaini	SVP Business Performance & Asset Optimization Cluster Logistic PT Danantara Asset Management (Persero) selaku penerima kuasa pemegang saham Seri B. SVP of Business Performance & Asset Optimization, Cluster Logistics, PT Danantara Asset Management (Persero), as the authorized representative of Series B shareholders.	Hadir Present
2	Endra Gunawan	Plt. Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik Kementerian BUMN RI Acting Assistant Deputy for Logistics Services, Ministry of SOE, Republic of Indonesia	Hadir Present
3	Arif Suhartono	Direktur Utama President Director	Hadir Present
4	Hambra	Wakil Direktur Utama Vice President Director	Hadir Present
5	Mega Satria	Direktur Keuangan Finance Director	Hadir Present

No	Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance
6	Ihsanuddin Usman	Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Human Capital and General Affairs Director	Hadir Present
7	Prasetyo	Direktur Strategi Strategy Director	Hadir Present
8	Boy Robyanto	Direktur Investasi Investment Director	Hadir Present
9	Putut Sri Muljanto	Direktur Pengelola Managing Director	Hadir Present
10	Agus Suhartono	Komisaris Utama/Komisaris Independen President Commissioner/Independent Commissioner	Hadir Present
11	Suntana	Wakil Komisaris Utama Vice President Commissioner	Hadir Present
12	Heru Sukanto	Komisaris Commissioner	Hadir Present
13	Jodi Mahardi	Komisaris Commissioner	Tidak Hadir Not Present
14	Andus Winarno	Komisaris Commissioner	Hadir Present
15	Elwi Danil	Komisaris Commissioner	Hadir Present
16	Rakhman Fuadhy Kurniawan	Komisaris Independen Independent Commissioner	Hadir Present

PIHAK INDEPENDEN

Pelindo telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Nanda Fauz Iwan dalam menyusun Akta hasil RUPS.

INDEPENDENT PARTY

Pelindo has appointed an independent party, namely Notary Nanda Fauz Iwan, to draw up the GMS Resolution Deed.

KEPUTUSAN DAN REALISASI RUPS TAHUNAN TENTANG PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN TAHUN BUKU 2024

RESOLUTION AND REALIZATION OF THE GMS ON APPROVAL OF FISCAL YEAR 2024 ANNUAL REPORT

Agenda Pertama
First Agenda

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan, Persetujuan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program pendanaan usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2024, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas Tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024.

Approval of the Annual Report and Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements, Approval of the Supervisory Duties of Board of Commissioners and Ratification of Financial Statements of Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for Fiscal Year 2024, as well as granting full release and discharge (volledig acquit et de charge) to Board of Directors for the management actions and to Board of Commissioners for the supervisory actions carried out during Fiscal Year 2024.

Keputusan:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2024 yang berakhir pada 31 Desember 2024.
2. Mengesahkan:
   a. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) sesuai laporannya Nomor: 00322/2.1032/AU.1/06/0697-5/1/III/2025 tanggal 24 Maret 2025 dengan opini "wajar, dalam semua hal yang material".
   b. Laporan Keuangan Program PUMK untuk Tahun Buku 2024 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) sesuai laporannya Nomor 00323/2.1032/AU.2/06/0697-5/1/III/2025 tanggal 24 Maret 2025 dengan opini "wajar, dalam semua hal yang material".
3. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK), seluruhnya untuk Tahun Buku 2024, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledif acquit et de charge*) kepada seluruh Anggota Direksi atas Tindakan pengurusan Perseroan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas Tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan peraturan Perundang-Undangan dan prosedur hukum yang berlaku, dan telah tercermin dalam laporan-laporan tersebut di atas.

Status: Telah Terealisasi

Resolution:

1. To approve the Company's Annual Report, including the Board of Commissioners' Supervisory Report for 2024 Fiscal Year ending December 31, 2024.
2. To ratify:
   a. The Company's Consolidated Financial Statements for 2024 Fiscal Year ending December 31, 2024, audited by Public Accounting Firm (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) in accordance with its report Number: 00322/2.1032/AU.1/06/0697-5/1/III/2025 dated March 24, 2025, with "unqualified" opinion.
   b. The Financial Report of PUMK Program for 2024 Fiscal Year ending on December 31, 2024, audited by Public Accounting Firm (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) according to its report Number 00323/2.1032/AU.2/06/0697-5/1/III/2025 dated March 24, 2025 with "unqualified" opinion.
3. With the approval of the Annual Report, including the Board of Commissioners' Supervisory Report, and the ratification of the Company's Financial Report and the Financial Report of Micro and Small Enterprise Funding Program (PUMK), all for 2024 Fiscal Year, the GMS granted full release and discharge (volledif acquit et de charge) to all members of Board of Directors for their management of the Company and to all members of Board of Commissioners for their supervisory actions carried out during the fiscal year ending December 31, 2024, provided that such actions do not constitute a criminal offense and/or violate applicable laws and regulations and legal procedures, and are reflected in the aforementioned reports.

Status: Realized

Agenda Kedua
Second Agenda

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024
Determination of the use of the Company's net profit for fiscal year 2024.

Keputusan:
Menetapkan penggunaan Laba Konsolidasian Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas Induk untuk Tahun Buku 2024 sebesar Rp3.583.830.946.928 (tiga triliun lima ratus delapan puluh tiga miliar delapan ratus tiga puluh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh delapan Rupiah) sebagai berikut:

1. Sebesar 47,46% atau sejumlah Rp1.700.765.881.000 (satu triliun tujuh ratus miliar tujuh ratus enam puluh lima juta delapan ratus delapan puluh satu ribu Rupiah) ditetapkan sebagai Dividen, yang pembayarannya dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Bagian dividen yang dibayarkan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna Perseroan sebesar Rp41.916 (empat puluh satu ribu sembilan ratus enam belas Rupiah) dibayarkan secara tunai ke rekening yang akan ditunjuk oleh Menteri BUMN;
   b. Bagian dividen atas Saham Seri B Perseroan sebesar Rp1.700.765.839.084 (satu triliun tujuh ratus miliar tujuh ratus enam puluh lima juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan puluh empat Rupiah) dibayarkan ke nomor rekening khusus Bank Mandiri atas nama PT Danantara Asset Management (Persero) dengan nomor rekening 1200014618875, yang akan dilakukan secara sekaligus paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan keputusan RUPS ini atau selambat-lambatnya 30 Juli 2025);
   c. Direksi diberi kuasa dan wewenang dengan hak substitusi untuk melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembayaran Dividen Perseroan, termasuk untuk melakukan:
      - Pemotongan pajak Dividen sesuai peraturan perpajakan yang berlaku dan
      - Hal-hal terkait teknis lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Sebesar 52,54% atau sejumlah Rp1.883.065.065.928 (satu triliun delapan ratus delapan puluh tiga miliar enam puluh lima juta enam puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh delapan Rupiah) digunakan sebagai saldo laba yang dicadangkan.

Status: Telah Terealisasi

Resolution:
To determine the use of the Company's Consolidated Profit attributable to the owners of the Parent Entity for 2024 Fiscal Year in the amount of Rp3,583,830,946,928 (three trillion five hundred eighty-three billion eight hundred thirty million nine hundred forty-six thousand nine hundred twenty-eight Rupiah) as follows:

1. 47.46% or Rp1,700,765,881,000 (one trillion seven hundred billion seven hundred sixty-five million eight hundred eighty-one thousand Rupiah) shall be designated as Dividends, the payment of which shall be made under the following provisions:
   a. The portion of dividends paid to the Company's Series A Dwiwarna Shareholders, amounting to Rp41,916 (forty-one thousand nine hundred sixteen Rupiah), shall be paid in cash to an account designated by the Minister of State-Owned Enterprises;
   b. The dividend portion of the Company's Series B Shares amounting to Rp1,700,765,839,084 (one trillion seven hundred billion seven hundred sixty-five million eight hundred thirty-nine thousand eighty-four Rupiah) will be paid to a special Bank Mandiri account in the name of PT Danantara Asset Management (Persero) with account number 1200014618875, which will be paid in one lump sum no later than 1 (one) month after the stipulation of this GMS resolution or no later than July 30, 2025).
   c. Board of Directors is granted the power and authority with the right of substitution to take necessary actions in connection with the payment of the Company's Dividends, including:
      - Withholding Dividend tax in accordance with applicable tax regulations and
      - Other technical matters in accordance with applicable regulations.
2. 52.54%, or Rp1,883,065,065,928 (one trillion eight hundred eighty-three billion sixty-five million sixty-five thousand nine hundred twenty-eight Rupiah), shall be designated as retained earnings.

Status: Realized

Agenda Ketiga
Third Agenda

Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2025 serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Kinerja Tahun Buku 2024
Determination of Salary/Honorarium along with Facilities and Allowances for the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for 2025 Fiscal Year as well as Tantiem/Performance Incentives/Special Incentives for members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for their Performance in 2024 Fiscal Year

Keputusan:
Penetapan Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus Tahun Buku 2024, Gaji untuk Direksi, dan Honorarium untuk Dewan Komisaris berikut Fasilitas dan Tunjangan Lainnya untuk Tahun Buku 2025, akan ditetapkan secara tersendiri oleh Pemegang Saham Seri B.

Status: Telah Terealisasi

Resolution:
Bonus/Performance Incentive/Special Incentive for 2024 Fiscal Year, Salaries for Board of Directors, and Honorarium for Board of Commissioners, along with other facilities and allowances for 2025 Fiscal Year, will be determined separately by the Series B Shareholder.

Status: Realized

Agenda Keempat
Fouth Agenda

Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Melaksanakan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian, Audit Kepatuhan PSA 62, Audit Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) terkait Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dan penerapan prosedur yang disepakati atas Laporan Hasil Evaluasi Kinerja KPI (*Key Perfomance Indicators*) Korporat dan KPI (*Key Perfomance Indicators*) Direksi Individual serta Laporan Evaluasi Komposit Risiko Tahun Buku 2025.
Appointment of Public Accounting Firm (KAP) to Conduct Consolidated Financial Statement Audit, PSA 62 Compliance Audit, Micro and Small Enterprise Funding Program (PUMK) Financial Statement Audit related to Social and Environmental Responsibility Program, and implementation of agreed procedures for Corporate KPI (Key Performance Indicators) Performance Evaluation Report and Individual Directors' KPI (Key Performance Indicators) and Composite Risk Evaluation Report for 2025 Fiscal Year.

Agenda Keempat
Fouth Agenda

Keputusan:
1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan melaksanakan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian, Audit Kepatuhan PSA 62, Audit Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) terkait Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dan penerapan prosedur yang disepakati atas Laporan Hasil Evaluasi Kinerja KPI (*Key Perfomance Indicators*) Korporat dan KPI (*Key Perfomance Indicators*) Direksi Individual serta Laporan Evaluasi Komposit Risiko Tahun Buku 2025.
2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa Audit Kantor Akuntan Publik yang telah disetujui pada keputusan angka 1 di atas dan penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
3. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pemegang Saham Seri B untuk menetapkan:
   a. Kantor Akuntan Publik pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugas karena sebab apapun; dan
   b. Kondisi persyaratan penunjukan dan honorarium Kantor Akuntan Publik pengganti.

Status: Telah Terealisasi

Resolution:
1. To appoint Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) as the Public Accounting Firm to conduct the Consolidated Financial Statement Audit, PSA 62 Compliance Audit, the Micro and Small Enterprise Funding Program (PUMK) Financial Statement Audit related to the Social and Environmental Responsibility Program, and to implement agreed-upon procedures for the Corporate Key Performance Indicators (KPIs) and Individual Directors' KPIs, as well as the Composite Risk Evaluation Report for 2025 Fiscal Year.
2. To delegate authority to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of the Public Accounting Firm's audit fees as approved in decision number 1 above, and to add any necessary scope of work and other reasonable requirements for the Public Accounting Firm.
3. To delegate authority to the Company's Board of Commissioners, after first obtaining written approval from Series B Shareholders, to determine:
   a. A replacement Public Accounting Firm if the appointed Public Accounting Firm is unable to continue or perform its duties for any reason; and
   b. Terms and conditions for the appointment and honorarium of the replacement Public Accounting Firm.

Status: Realized

Agenda Kelima
Fifth Agenda

Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara.
Report on the Realization of Additional Use of State Equity Participation Funds.

Keputusan:
Menerima Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) yang berasal dari APBN Tahun Anggaran 2021 untuk periode Tahun Buku 2024 dengan ketentuan semua kegiatan dan penggunaan telah sesuai dengan Kajian Bersama PMN dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, sepanjang tidak ditemukan adanya penyimpangan di kemudian hari.

Status: Telah Terealisasi

Resolution:
To accept Report on the Realization of the Use of Additional State Capital Participation (PMN) Funds from the 2021 State Budget for 2024 Fiscal Year, provided that all activities and uses comply with the Joint PMN Review and Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, and no deviations are discovered later.

Status: Realized

Agenda Keenam
Sixth Agenda

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
Amendments to the Company's Articles of Association.

Keputusan:

1. Menyetujui perubahan pasal 4 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan dalam hal ini perubahan nama Pemegang Saham Perseroan yang sebelumnya adalah PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) menjadi PT Danantara Asset Management (Persero), sehingga susunan Pemegang Saham menjadi sebagai berikut:
   a. Negara RI sebanyak 1 lembar saham seri A Dwiwarna dengan nilai nominal seluruhnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
   b. PT Danantara Asset Management (Persero) sebanyak 40.575.583 (empat puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus delapan puluh tiga) lembar saham seri B, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp40.575.583.000.000 (empat puluh triliun lima ratus tujuh puluh lima miliar lima ratus delapan puluh tiga juta rupiah).
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Status: Telah Terealisasi

Resolution:

1. To approve amendments to Article 4 paragraph (3) of the Company's Articles of Association, specifically the change of name of the Company's Shareholders from PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) to PT Danantara Asset Management (Persero), accordingly the composition of Shareholders is as follows:
   a. The Republic of Indonesia, 1 Series A Dwiwarna share with a total nominal value of Rp1,000,000.00 (one million rupiah);
   b. PT Danantara Asset Management (Persero), 40,575,583 (forty million five hundred seventy-five thousand five hundred eighty-three) Series B shares, with a total nominal value of Rp40,575,583,000,000 (forty trillion five hundred seventy-five billion five hundred eighty-three million rupiah).
2. Granting power and authority to the Board of Directors with the right of substitution to take all necessary actions related to the resolution on this Meeting agenda, including drafting and restating the entire Articles of Association in a Notarial Deed and submitting it to the authorized agency for approval and/or receipt of notification of changes to the Company's Articles of Association. Performing everything deemed necessary and useful for these purposes, with nothing being excluded, including making additions and/or changes to the amendments to the Articles of Association if required by the authorized agency.

Status: Realized

TINDAK LANJUT ARAHAN PEMEGANG SAHAM RUPS TAHUNAN TENTANG PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN TAHUN BUKU 2024

FOLLOW-UP ON SHAREHOLDERS' DIRECTIVES AT ANNUAL GMS ON THE RATIFICATION OF ANNUAL REPORT FOR FISCAL YEAR 2024

No.	Arahan Directives	Tindak Lanjut Follow-up
1	1. Saat ini sedang disusun kajian terkait dengan peningkatan konektivitas Pelabuhan Indonesia dengan Global oleh SPTP, yang salah satunya mengidentifikasi peluang Pelindo untuk bisa compete dalam kontestasi market transshipment internasional. 2. Sedang dilakukan penyusunan Kajian Roadmap Transformasi Pelindo 2025-2045 yang mengakomodir berbagai key initiative pada jangka panjang sehingga dapat mendukung peningkatan peran Pelindo dalam logistik Nasional khususnya dalam Ekosistem Maritim, diantaranya: 1) Peningkatan konektivitas global & mengkapitalisasi jalur maritim internasional, 2) Peningkatan layanan pelabuhan yang terintegrasi dan berkinerja tinggi, serta 3) Membangun kawasan logistik terintegrasi berbasis pelabuhan. 1. A study is currently being prepared by the Ports and Ports Authority (SPTP) to improve connectivity between Indonesian ports and the world, one of which is identifying opportunities for Pelindo to compete in the international transshipment market. 2. A Pelindo Transformation Roadmap Study for 2025-2045 is being prepared, which incorporates various long-term key initiatives to support Pelindo's growing role in national logistics, particularly within the Maritime Ecosystem. These include: 1) Improving global connectivity and capitalizing on international maritime routes, 2) Improving integrated and high-performance port services, and 3) Building a port-based integrated logistics area.	1. Saat ini sedang disusun kajian terkait dengan peningkatan konektivitas Pelabuhan Indonesia dengan Global oleh SPTP, yang salah satunya mengidentifikasi peluang Pelindo untuk bisa compete dalam kontestasi market transshipment internasional. 2. Sedang dilakukan penyusunan Kajian Roadmap Transformasi Pelindo 2025-2045 yang mengakomodir berbagai key initiative pada jangka panjang sehingga dapat mendukung peningkatan peran Pelindo dalam logistik Nasional khususnya dalam Ekosistem Maritim, diantaranya: 1) Peningkatan konektivitas global & mengkapitalisasi jalur maritim internasional, 2) Peningkatan layanan pelabuhan yang terintegrasi dan berkinerja tinggi, serta 3) Membangun kawasan logistik terintegrasi berbasis pelabuhan. 3. A study is currently being prepared by the Ports and Ports Authority (SPTP) to improve connectivity between Indonesian ports and the world, one of which is identifying opportunities for Pelindo to compete in the international transshipment market. 4. A Pelindo Transformation Roadmap Study for 2025-2045 is being prepared, which incorporates various long-term key initiatives to support Pelindo's growing role in national logistics, particularly within the Maritime Ecosystem. These include: 1) Improving global connectivity and capitalizing on international maritime routes, 2) Improving integrated and high-performance port services, and 3)

No.	Arahan Directives	Tindak Lanjut Follow-up
2	Dalam rangka menindaklanjuti Surat Kementerian BUMN Nomor: S-48/MBU/Wk.K/02/2025 tanggal 20 Februari 2025 tentang Rencana Integrasi Ekosistem Maritim kepada Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), dan Direksi PT PELNI (Persero), saat ini sedang dilakukan pembentukan tim dan penyusunan kajian bersama terkait Rencana Integrasi Ekosistem Maritim. In response to the Ministry of State-Owned Enterprises' Letter No. S-48/MBU/Wk.K/02/2025 dated February 20, 2025, concerning the Maritime Ecosystem Integration Plan to the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero), PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), and PT PELNI (Persero), a team is being formed and a joint study is being prepared regarding the Maritime Ecosystem Integration Plan.	Dalam rangka menindaklanjuti Surat Kementerian BUMN Nomor: S-48/MBU/Wk.K/02/2025 tanggal 20 Februari 2025 tentang Rencana Integrasi Ekosistem Maritim kepada Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), dan Direksi PT PELNI (Persero), saat ini sedang dilakukan pembentukan tim dan penyusunan kajian bersama terkait Rencana Integrasi Ekosistem Maritim. In response to the Ministry of State-Owned Enterprises' Letter No. S-48/MBU/Wk.K/02/2025 dated February 20, 2025, concerning the Maritime Ecosystem Integration Plan to the Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero), PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), and PT PELNI (Persero), a team is being formed and a joint study is being prepared regarding the Maritime Ecosystem Integration Plan.
3	Subholding PT Pelindo Terminal Petikemas sesuai amanat Buku Putih merger serta RJPP tengah berupaya menjalankan Inisiatif Strategis Pengembangan Hub and Spoke untuk mendukung konektivitas nasional, yang saat ini menganalisa opsi konsolidasi di Indonesia Timur di Hub dan Sub Hub di beberapa lokasi Indonesia Timur diantaranya Makasar, Ambon, dsb. Adapun untuk mewujudkan Inisiatif ini memerlukan berbagai pre requisite dukungan seperti kerjasama dengan Pelayaran dan dukungan dari Pemerintah. In accordance with the mandate of the merger White Paper and the Long-Term Development Plan (RJPP), the subholding of PT Pelindo Terminal Petikemas is working to implement the Hub and Spoke Development Strategic Initiative to support national connectivity. It is currently analyzing consolidation options in Eastern Indonesia, with hubs and subhubs in several locations, including Makassar, Ambon, and others. Realizing this initiative requires various prerequisites, such as collaboration with shipping companies and government support.	Subholding PT Pelindo Terminal Petikemas sesuai amanat Buku Putih merger serta RJPP tengah berupaya menjalankan Inisiatif Strategis Pengembangan Hub and Spoke untuk mendukung konektivitas nasional, yang saat ini menganalisa opsi konsolidasi di Indonesia Timur di Hub dan Sub Hub di beberapa lokasi Indonesia Timur diantaranya Makasar, Ambon, dsb. Adapun untuk mewujudkan Inisiatif ini memerlukan berbagai pre requisite dukungan seperti kerjasama dengan Pelayaran dan dukungan dari Pemerintah. In accordance with the mandate of the merger White Paper and the Long-Term Development Plan (RJPP), the subholding of PT Pelindo Terminal Petikemas is working to implement the Hub and Spoke Development Strategic Initiative to support national connectivity. It is currently analyzing consolidation options in Eastern Indonesia, with hubs and subhubs in several locations, including Makassar, Ambon, and others. Realizing this initiative requires various prerequisites, such as collaboration with shipping companies and government support.
4	Dalam meningkatkan kualitas layanan operasional, telah dilakukan standardisasi pelayanan kapal di 76 cabang sampai dengan Tw 1 Tahun 2025. Selanjutnya, proses standardisasi pelayanan kapal akan dilanjutkan pada pelayanan kapal di beberapa perairan pelimpahan dalam lingkup SPJM Group. Untuk pelayanan terminal, telah standardisasi di 47 cabang/terminal non petikemas sampai dengan TW 1 Tahun 2025. Selain itu, telah disusun roadmap untuk peningkatan status dermaga menjadi dedicated area pada 18 terminal. To improve the quality of operational services, ship services have been standardized at 76 branches by Q1 2025. Furthermore, the standardization process for ship services will continue for ship services in several waterways within SPJM Group. For terminal services, standardization has been achieved at 47 non-container branches/terminals by Q1 2025. Furthermore, a roadmap has been developed to upgrade docks to dedicated areas at 18 terminals.	Dalam meningkatkan kualitas layanan operasional, telah dilakukan standardisasi pelayanan kapal di 76 cabang sampai dengan Tw 1 Tahun 2025. Selanjutnya, proses standardisasi pelayanan kapal akan dilanjutkan pada pelayanan kapal di beberapa perairan pelimpahan dalam lingkup SPJM Group. Untuk pelayanan terminal, telah standardisasi di 47 cabang/terminal non petikemas sampai dengan TW 1 Tahun 2025. Selain itu, telah disusun roadmap untuk peningkatan status dermaga menjadi dedicated area pada 18 terminal. To improve the quality of operational services, ship services have been standardized at 76 branches by Q1 2025. Furthermore, the standardization process for ship services will continue for ship services in several waterways within SPJM Group. For terminal services, standardization has been achieved at 47 non-container branches/terminals by Q1 2025. Furthermore, a roadmap has been developed to upgrade docks to dedicated areas at 18 terminals.
5	1. Terhadap keberadaan TUKS telah dikirimkan surat ke Kemenhub dan telah melakukan transformasi dalam upaya peningkatan layanan seperti pengelolaan dan pemeliharaan alat pendukung kegiatan bongkar muat, meningkatkan kualitas SDM, memperbaiki infrastruktur utama, mengimplementasikan sistem operasi secara real time yang dapat di akses pengguna jasa; 2. Dalam peralihan dari Petikemas ke Roro, adanya penyesuaian tarif dan perbaikan layanan petikemas; 3. Terkait Pelayanan Pemanduan dan Penundaan, dilakukan perluasan wilayah pemanduan dan penundaan, serta peningkatan layanan melalui transformasi pelabuhan.	1. Terhadap keberadaan TUKS telah dikirimkan surat ke Kemenhub dan telah melakukan transformasi dalam upaya peningkatan layanan seperti pengelolaan dan pemeliharaan alat pendukung kegiatan bongkar muat, meningkatkan kualitas SDM, memperbaiki infrastruktur utama, mengimplementasikan sistem operasi secara real time yang dapat di akses pengguna jasa;\ 2. Dalam peralihan dari Petikemas ke Roro, adanya penyesuaian tarif dan perbaikan layanan petikemas; 3. Terkait Pelayanan Pemanduan dan Penundaan, dilakukan perluasan wilayah pemanduan dan penundaan, serta peningkatan layanan melalui transformasi pelabuhan.

No.	Arahan Directives	Tindak Lanjut Follow-up
	1. Regarding the existence of TUKS, a letter has been sent to the Ministry of Transportation and they have implemented transformations to improve services, such as managing and maintaining supporting equipment for loading and unloading activities, improving human resources, improving key infrastructure, and implementing a real-time operating system accessible to service users. 2. In the transition from Container to RoRo, tariff adjustments and improvements to container services have been made. 3. Regarding Pilotage and Towing Services, pilotage and towing areas have been expanded, and services have been improved through port transformation.	1. Regarding the existence of TUKS, a letter has been sent to the Ministry of Transportation and they have implemented transformations to improve services, such as managing and maintaining supporting equipment for loading and unloading activities, improving human resources, improving key infrastructure, and implementing a real-time operating system accessible to service users. 2. In the transition from Container to RoRo, tariff adjustments and improvements to container services have been made. 3. Regarding Pilotage and Towing Services, pilotage and towing areas have been expanded, and services have been improved through port transformation.
6	Per Desember 2024, telah terealisasi value creation sebesar Rp 5,440 milyar dari target Rp 6,077 milyar atau 90% dari target melalui cost efficiency dan revenue enhancement. Beberapa inisiatif strategis yang menjadi kontributor terbesar value creation diantaranya Penurunan/optimalisasi financing cost sebesar Rp 2,655 miliar, Pengadaan bersama / terpusat sebesar Rp 480 miliar, Pembentukan klaster dan model Bisnis sebesar Rp 425 miliar dan Pengembangan potensi pelabuhan melalui sinergi investasi dengan strategic partners (e.g. INA) sebesar Rp 411 miliar. Pelindo akan tetap melanjutkan navigasi dan monitoring terhadap progres program kerja strategis dan pencapaian value creation sebagaimana target yang telah ditetapkan, utamanya terhadap program yang berkaitan dengan ekspansi bisnis. As of December 2024, value creation of Rp5,440 billion has been realized against the Rp6,077 billion target, or 90% of the target through cost efficiency and revenue enhancement. Several strategic initiatives that contributed the most to value creation include reducing/optimizing financing costs by Rp2,655 billion, joint/centralized procurement by Rp480 billion, establishing clusters and business models by Rp425 billion, and developing port potential through investment synergies with strategic partners (e.g., INA) by Rp411 billion. Pelindo will continue to navigate and monitor the progress of strategic work programs and the achievement of value creation, as set targets, particularly for programs related to business expansion	Per Desember 2024, telah terealisasi value creation sebesar Rp 5,440 milyar dari target Rp 6,077 milyar atau 90% dari target melalui cost efficiency dan revenue enhancement. Beberapa inisiatif strategis yang menjadi kontributor terbesar value creation diantaranya Penurunan/optimalisasi financing cost sebesar Rp 2,655 miliar, Pengadaan bersama / terpusat sebesar Rp 480 miliar, Pembentukan klaster dan model Bisnis sebesar Rp 425 miliar dan Pengembangan potensi pelabuhan melalui sinergi investasi dengan strategic partners (e.g. INA) sebesar Rp 411 miliar. Pelindo akan tetap melanjutkan navigasi dan monitoring terhadap progres program kerja strategis dan pencapaian value creation sebagaimana target yang telah ditetapkan, utamanya terhadap program yang berkaitan dengan ekspansi bisnis. As of December 2024, value creation of Rp5,440 billion has been realized against the Rp6,077 billion target, or 90% of the target through cost efficiency and revenue enhancement. Several strategic initiatives that contributed the most to value creation include reducing/optimizing financing costs by Rp2,655 billion, joint/centralized procurement by Rp480 billion, establishing clusters and business models by Rp425 billion, and developing port potential through investment synergies with strategic partners (e.g., INA) by Rp411 billion. Pelindo will continue to navigate and monitor the progress of strategic work programs and the achievement of value creation, as set targets, particularly for programs related to business expansion.
7	Sudah disusun melalui program efisiensi biaya tahun 2025 untuk mengendalikan beban-beban dengan target efisiensi tahun 2025 sebesar Rp 119 miliar dengan 10 tema efisiensi yakni Optimasi Beban Bahan Bakar, Optimasi Kontrak Kerjasama Operasi, Sewa dan Penunjang Operasi,Pengadaan Bersama,Efisiensi Beban Pemeliharaan, Optimasi Pemanfaatan Teknologi dan Informasi,Efisiensi Beban langganan Listrik, Air dan Telepon,Optimasi Beban SDM, Efisiensi Beban Administrasi dan Umum, Efisiensi Beban Konsultan dan Efisiensi Beban Keuangan A cost efficiency program has been developed for 2025 to control expenses, with a 2025 efficiency target of Rp119 billion. These 10 efficiency themes include: Fuel Cost Optimization, Operational Cooperation Contract Optimization, Lease and Operational Support, Joint Procurement, Maintenance Cost Efficiency, Technology and Information Utilization Optimization, Electricity, Water, and Telephone Subscription Cost Efficiency, Human Resources Cost Optimization, Administration and General Cost Efficiency, Consultant Cost Efficiency, and Financial Cost Efficiency.	Sudah disusun melalui program efisiensi biaya tahun 2025 untuk mengendalikan beban-beban dengan target efisiensi tahun 2025 sebesar Rp 119 miliar dengan 10 tema efisiensi yakni Optimasi Beban Bahan Bakar, Optimasi Kontrak Kerjasama Operasi, Sewa dan Penunjang Operasi,Pengadaan Bersama,Efisiensi Beban Pemeliharaan, Optimasi Pemanfaatan Teknologi dan Informasi,Efisiensi Beban langganan Listrik, Air dan Telepon,Optimasi Beban SDM, Efisiensi Beban Administrasi dan Umum, Efisiensi Beban Konsultan dan Efisiensi Beban Keuangan A cost efficiency program has been developed for 2025 to control expenses, with a 2025 efficiency target of Rp119 billion. These 10 efficiency themes include: Fuel Cost Optimization, Operational Cooperation Contract Optimization, Lease and Operational Support, Joint Procurement, Maintenance Cost Efficiency, Technology and Information Utilization Optimization, Electricity, Water, and Telephone Subscription Cost Efficiency, Human Resources Cost Optimization, Administration and General Cost Efficiency, Consultant Cost Efficiency, and Financial Cost Efficiency.

No.	Arahan Directives	Tindak Lanjut Follow-up
	Subholding PT Pelindo Solusi Logistik beserta anak perusahaanya (PT Akses Pelabuhan Indonesia) sudah merencanakan mitigasi risiko melalui 2 program besar yakni : 1. Integrasi JTCC dengan Jaringan Tol Jabodetabek. Saat ini sedang dalam tahap Penyusunan Kajian Integrasi Tarif JTCC dengan Jaringan Tol Jabodetabek serta Usulan Integrasi Tarif JTCC dengan Jaringan Tol Jabodetabek kepada BUJT terkait dan Kementrian PU (surat tertanggal 7 Maret 2025 kepada Menteri Pekerjaan Umum RI). 2. Pengembangan Rest Area dan Logistic Hub di JTCC. Saat ini sedang dalam tahap evaluasi proposal kerjasama dari calon mitra untuk pengembangan Rest Area & Logistic Hub. The subholding company, PT Pelindo Solusi Logistik, and its subsidiary (PT Akses Pelabuhan Indonesia), have planned risk mitigation through two major programs: 1. Integration of JTCC with Jabodetabek Toll Road Network. Currently, a study is being prepared on the integration of JTCC tariffs with Jabodetabek Toll Road Network and a proposal for JTCC tariff integration with Jabodetabek Toll Road Network to the relevant BUJT (Business Enterprises) and the Ministry of Public Works (letter dated March 7, 2025, to the Minister of Public Works). 2. Development of a Rest Area and Logistics Hub at JTCC. Currently in the evaluation stage of cooperation proposals from potential partners for the development of the Rest Area & Logistics Hub. 3. with applicable procedures and regulations.	Subholding PT Pelindo Solusi Logistik beserta anak perusahaanya (PT Akses Pelabuhan Indonesia) sudah merencanakan mitigasi risiko melalui 2 program besar yakni : 1. Integrasi JTCC dengan Jaringan Tol Jabodetabek. Saat ini sedang dalam tahap Penyusunan Kajian Integrasi Tarif JTCC dengan Jaringan Tol Jabodetabek serta Usulan Integrasi Tarif JTCC dengan Jaringan Tol Jabodetabek kepada BUJT terkait dan Kementrian PU (surat tertanggal 7 Maret 2025 kepada Menteri Pekerjaan Umum RI). 2. Pengembangan Rest Area dan Logistic Hub di JTCC. Saat ini sedang dalam tahap evaluasi proposal kerjasama dari calon mitra untuk pengembangan Rest Area & Logistic Hub. 3. The subholding company, PT Pelindo Solusi Logistik, and its subsidiary (PT Akses Pelabuhan Indonesia), have planned risk mitigation through two major programs: 1. Integration of JTCC with Jabodetabek Toll Road Network. Currently, a study is being prepared on the integration of JTCC tariffs with Jabodetabek Toll Road Network and a proposal for JTCC tariff integration with Jabodetabek Toll Road Network to the relevant BUJT (Business Enterprises) and the Ministry of Public Works (letter dated March 7, 2025, to the Minister of Public Works). 2. Development of a Rest Area and Logistics Hub at JTCC. Currently in the evaluation stage of cooperation proposals from potential partners for the development of the Rest Area & Logistics Hub. 3. with applicable procedures and regulations.
	Telah dilakukan penyelarasan pelaksanaan investasi dengan anggaran investasi tahun berjalan agar setiap investasi tidak melebihi kebutuhan dana serta memprioritaskan investasi yang meningkatkan pendapatan level of revenue, selain itu manajemen memastikan bahwa pelaksanaan investasi telah menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, melakukan mitigasi risiko yang tepat guna, termasuk langkah preventif dan responsif dalam menghadapi potensi risiko yang mungkin terjadi sepanjang proses pelaksanaan investasi serta mematuhi prosedur dan ketentuan yang berlaku Investment implementation has been aligned with the current year's investment budget to ensure that each investment does not exceed funding requirements and prioritizes investments that increase revenue. Furthermore, management ensures that investment implementation has implemented good corporate governance principles, implemented appropriate risk mitigation, including preventive and responsive measures to address potential risks that may arise throughout the investment implementation process, and complied	Telah dilakukan penyelarasan pelaksanaan investasi dengan anggaran investasi tahun berjalan agar setiap investasi tidak melebihi kebutuhan dana serta memprioritaskan investasi yang meningkatkan pendapatan level of revenue, selain itu manajemen memastikan bahwa pelaksanaan investasi telah menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, melakukan mitigasi risiko yang tepat guna, termasuk langkah preventif dan responsif dalam menghadapi potensi risiko yang mungkin terjadi sepanjang proses pelaksanaan investasi serta mematuhi prosedur dan ketentuan yang berlaku Investment implementation has been aligned with the current year's investment budget to ensure that each investment does not exceed funding requirements and prioritizes investments that increase revenue. Furthermore, management ensures that investment implementation has implemented good corporate governance principles, implemented appropriate risk mitigation, including preventive and responsive measures to address potential risks that may arise throughout the investment implementation process, and complied

PELAKSANAAN RUPS TAHUNAN TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN TAHUN 2024 DAN REALISASINYA

Pelaksanaan RUPS dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Senin, 29 Januari 2024
Waktu : 08.30 – 09.45 WIB
Tempat : Hotel Aryaduta, Menteng, Jakarta Pusat

ANNUAL GMS ON THE APPROVAL OF 2024 CORPORATE WORK PLAN AND BUDGET AND THE REALIZATION

The GMS was held on:
Day/Date : Monday, January 29, 2024
Time : 08.30 – 09.45 WIB
Place : Aryaduta Hotel, Menteng, Jakarta

REKAPITULASI KEHADIRAN PADA RUPS TAHUNAN TENTANG PENGESAHAN RKAP TAHUN 2024

RECAPITULATION OF ATTENDANCE AT THE GMS ON 2024 RKAP APPROVAL

No	Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance
1	Agus Suhartono	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner and Independent Commissioner	Hadir Present
2	Jodi mahardi	Komisaris Commissioner	Hadir Present
3	Andus Winarno	Komisaris Commissioner	Hadir Present
4	Heru Sukanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Hadir Present
5	Sudung Situmorang	Komisaris Independen Independent Commissioner	Hadir Present
6	Didi Sumedi	Komisaris Commissioner	Tidak Hadir Not Present
7	Arif Toha Tjahjagama	Komisaris Commissioner	Hadir Present
8	Arif Suhartono	Direktur Utama President Director	Hadir Present
9	Hambra	Wakil Direktur Utama Vice President Director	Hadir Present
10	Ihsanuddin Usman	Direktur SDM dan Umum Human Resources and General Affairs Director	Hadir Present
11	Boy Robyanto	Direktur Investasi Investment Director	Hadir Present
12	Mega Satria	Direktur Keuangan Finance Director	Hadir Present
13	Prasetyo	Direktur Strategi Strategy Director	Hadir Present
14	Putut Sri Muljanto	Direktur Pengelola Managing Director	Hadir Present

PIHAK INDEPENDEN

Pelindo telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Nanda Fauz Iwan dalam menyusun Akta hasil RUPS.

INDEPENDENT PARTY

Pelindo has appointed an independent party, namely Notary Nanda Fauz Iwan, to draw up the GMS Resolution Deed.

KEPUTUSAN DAN REALISASI RUPS TAHUNAN TENTANG PENGESAHAN RKAP TAHUN 2024

RESOLUTION AND REALIZATION OF THE GMS ON 2024 RKAP

Agenda Pertama First Agenda
Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2024 dan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2024. Approval of 2024 Company Work Plan and Budget (RKAP) and 2024 Board of Commissioners Work Plan and Budget.

Agenda Pertama
First Agenda

Keputusan:
Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKAP) Tahun 2024 dan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Tahun 2024, dengan pokok-pokok sebagai berikut:

1. Laba (Rugi) Konsolidasian
   a. Pendapatan sebesar Rp32.294.159.581.574,00 (tiga puluh dua triliun dua ratus sembilan puluh empat miliar seratus lima puluh Sembilan juta lima ratus delapan puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah).
   b. Laba Usaha sebesar Rp6.718.879.837.767,00 enam triliun tujuh ratus delapan belas miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah).
   c. EBITDA sebesar Rp10.635.231.202.373,00 (sepuluh triliun enam ratus tiga puluh lima miliar dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus dua ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah).
   d. Laba bersih sebesar Rp3.500.472.718.283,00 (tiga triliun lima ratus miliar empat ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah).
   e. Laba Bersih (Atribusi Induk) sebesar Rp3.270.021.720.333,00 (tiga triliun dua ratus tujuh puluh miliar dua puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).
2. Posisi Keuangan Konsolidasian
   a. Total Aset sebesar Rp112.981.030.678.967,00 (seratus dua belas triliun sembilan ratus delapan puluh satu miliar tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah).
   b. Ekuitas sebesar Rp50.064.104.762.301,00 (lima puluh triliun enam puluh empat miliar seratus empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tiga ratus satu rupiah).
   c. Interest Bearing Debt sebesar Rp45.193.275.729.850,00 (empat puluh lima triliun seratus sembilan puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
3. Net Operating Cash Flow sebesar Rp9.423.534.240.380,00 (sembilan triliun empat ratus dua puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).
4. Capital Expenditure sebesar Rp7.714.654.971.856,00 (tujuh triliun tujuh ratus empat belas miliar enam ratus lima puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah).

Status: Telah Terealisasi

Resolution:
Approved the 2024 Work Plan and Budget (RKAP) and the 2024 Work Plan and Budget of Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia (Persero), with the following points:

1. Consolidated Profit (Loss)
   a. Revenue of Rp32,294,159,581,574.00 (thirty-two trillion two hundred ninety-four billion one hundred fifty-nine million five hundred eighty-one thousand five hundred seventy-four rupiah).
   b. Operating Profit of Rp6,718,879,837,767.00 (six trillion seven hundred eighteen billion eight hundred seventy nine million eight hundred thirty seven thousand seven hundred sixty seven rupiah).
   c. EBITDA amounted to Rp10,635,231,202,373.00 (ten trillion six hundred thirty-five billion two hundred thirty-one million two hundred two thousand three hundred seventy-three rupiah).
   d. Net profit of Rp3,500,472,718,283.00 (three trillion five hundred billion four hundred seventy-two million seven hundred eighteen thousand two hundred eighty-three rupiah).
   e. Net Profit (Parent Attribution) of Rp3,270,021,720,333.00 (three trillion two hundred seventy billion twenty one million seven hundred twenty thousand three hundred thirty three rupiah).
2. Consolidated Financial Position
   a. Total Assets of Rp112,981,030,678,967.00 (one hundred twelve trillion nine hundred eighty-one billion thirty million six hundred seventy-eight thousand nine hundred sixty-seven rupiah).
   b. Equity of Rp50,064,104,762,301.00 (fifty trillion sixty-four billion one hundred four million seven hundred sixty-two thousand three hundred and one rupiah).
   c. Interest Bearing Debt of Rp45,193,275,729,850.00 (forty-five trillion one hundred ninety-three billion two hundred seventy-five million seven hundred twenty-nine thousand eight hundred fifty rupiah).
3. Net Operating Cash Flow of Rp9,423,534,240,380.00 (nine trillion four hundred twenty-three billion five hundred thirty-four million two hundred forty thousand three hundred eighty rupiah).
4. Capital Expenditure of Rp7,714,654,971,856.00 (seven trillion seven hundred fourteen billion six hundred fifty four million nine hundred seventy one thousand eight hundred fifty six rupiah).

Status: Realized

Agenda Kedua
Second Agenda

Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA-TJSL) Tahun 2024
Approval of the 2024 Work Plan and Budget for Social and Environmental Responsibility Program (RKA-TJSL).

Keputusan:
Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA-TJSL) Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dengan Total Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) sebesar Rp18.376.761.086,00 (delapan belas miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus enam puluh satu ribu delapan puluh enam rupiah dan Community Involvement Development (CID) Non-PUMK sebesar Rp127.378.260.000,00 (seratus dua puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu).

Status: Telah Terealisasi
Resolution:
Approved the 2023 (two thousand and twenty-three) Social and Environmental Responsibility Program Work Plan and Budget (RKA-TJSL) of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) with a total Micro and Small Business Funding Program (PUMK) of Rp18,376,761, 086.00 (eighteen billion three hundred seventy-six million seven hundred sixty-one thousand and eighty-six rupiah) and Community Involvement Development (CID) Non-PUMK amounting to Rp127,378,260,000.00 (one hundred twenty-seven billion three hundred seventy-eight million two hundred sixty thousand rupiah).

Status: Realized

Agenda Ketiga
Third Agenda

Penetapan Kontrak Manajemen Tahunan yang memuat Target *Key Perfomance Indicators* (KPI) Direksi secara Kolegial dan Dewan Komisaris Tahun 2024
Determination of the 2024 Annual Management Contract, which contains collegial Key Performance Indicators of Board of Directors.

Keputusan:
Menetapkan Kontrak Manajemen Tahunan yang memuat target *Key Performance Indicators* (KPI) Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) secara Kolegial Tahun 2024 (dua ribu dua puluh tiga), sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Resolution:
Determined the 2024 (two thousand twenty-four) Annual Management Contract, which contains collegial Key Performance Indicators of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero), as attached and is an integral part of this resolution.

No	KPI	ESG	PS 88	Satuan Unit	Bobot Weight		Polaritas Polarity	Target 2024 2024 Target
					Sub	Total		
Nilai Ekonomi dan Sosial Untuk Indonesia Economic and Social Value for Indonesia						59		
	Finansial Financial							
1	EBITDA	C	-	Rupiah (Miliar) (Billion)	7	14	Maximize	10.635
2	ROIC > WACC	C	-	%	7		Maximize	0,82
3	Interest Bearing Debt to EBITDA	G	-	Kali Times	6	12	Minimize	4,25
4	Interest Bearing Debt to Invested Capital	G	-	%	6		Minimize	48,48
	Operasional Operational							
5	Volume Trafik Traffic Volume	C	-	%	10	22	Maximize	100
6	Capaian Produktivitas Productivity Achievement	C	-	%	11		Maximize	100
	Sosial Social							
7	Implementasi Green Technology di Pelabuhan Implementation of Green Technology at Ports	E	-	%	6	12	Maximize	100
8	Peningkatan TKDN dibandingkan tahun sebelumnya Increase in Domestic Content Ratio (TKDN) compared to the previous year	S	-	%	6		Maximize	30
B. Inovasi Model Bisnis Business Model Innovation						12		
9	Penyelesaian pemurnian bisnis Completion of business refinement	C	-	%	3		Maximize	100
10	Additional Marine Service	C	-	Jumlah	3		Maximize	4
11	Implementasi sinergi dan integrasi logistik dalam ekosistem BUMN Implementation of synergy and logistics integration in the SOE ecosystem	C	-	%	3		Maximize	100
12	Implementasi Roadmap Perbaikan Penerapan Manajemen Risiko Implementation of Risk Management Improvement Roadmap	C	-	%	3		Maximize	100
C. Kepimimpinan Teknologi Technology Leadership						10		
13	Standardisasi dan Digitalisasi Layanan Petikemas & Non Petikemas Standardization and Digitization of Container & Non-Container Services	C	-	%	5		Maximize	100

No	KPI	ESG	PS 88	Satuan Unit	Bobot Weight Sub	Bobot Weight Total	Polaritas Polarity	Target 2024 2024 Target
14	Standardisasi dan Digitalisasi Layanan Marine Standardization and Digitization of Marine Services	C	-	%	5		Maximize	100
D. Peningkatan Investasi Investment Increase						7		
15	Pengembangan Infrastruktur dan peralatan Pelabuhan Development of Port Infrastructure and Equipment	C	-	%	4		Maximize	100
16	Realisasi PMN PMN Realization	S	-	%	3		Maximize	100
E. Pengembangan Talenta Talent Development						12		
17	Rasio top talent muda (<=42 tahun) dalam nominated talent Young top talent ratio (<=42 years old) in nominated talent	S	-	%	3		Maximize	15
18	Rasio Perempuan dalam nominated talent Female ratio in nominated talent	S	-	%	3		Maximize	15
19	Rasio Pemenuhan Klasifikasi Organ Pengelola Risiko (Rasio Kualifikasi) Risk Management Organ Classification Fulfillment Ratio (Qualification Ratio)	S	-	%	3		Maximize	90
20	Penyelesaian Roadmap Penyehatan Dana Pensiun Completion of Pension Fund Restructuring Roadmap	G	-	%	3		Maximize	100
	Total					100		

Key Performance Indicators PMN
PMN' Key Performance Indicators

No.	KPI	Satuan Unit	Target RKAP RKAP Target	Polaritas Polarity	Proporsi Proportion
Output					
1	Akumulasi Progress Proyek Pengerukan dan Dinding Penahan Tanah (Revetment Wall) Progress Accumulation of Dredging and Retaining Wall Projects	%	100	Maksimal Maximize	15
2	Akumulasi Penyerapan Dana PMN PMN Fund Absorption Accumulation	%	100	Maksimal Maximize	15
Outcome					
1	Jumlah Kunjungan Kapal Cruise Total Cruise Ship Visit	Call	52	Maksimal Maximize	20
2	Penyerapan Mitra UMKM MSME Partner Absorption	Unit Stand Stand Unit	80	Maksimal Maximize	20
3	Kontribusi Pendapatan Revenue Contribution	Rupiah (Miliar) Rupiah (Billion)	135,38	Maksimal Maximize	15
4	Jumlah Wisatawan Luar Negeri Total Overseas Travelers	Orang People	59.500	Maksimal Maximize	15
Total					**100**

Key Performance Indicators (KPI) Dewan Komisaris

Board of Commissioners' Key Performance Indicators (KPI)

Key Performance Indicator

No.	Indikator Pencapaian Kinerja Performance Achievement Indicator	Satuan Unit	Bobot Weight	Target Target
1.	Kontribusi terhadap capaian kinerja perusahaan Contribution to the Company's performance achievements		10	
	Kontribusi terhadap realisasi capaian KPI Direksi Contribution to the realization of Board of Directors' KPI achievements	Poin Points	10	100
2.	Ketepatan waktu penyampaian Pendapat dan Saran yang menjadi kewajiban Dewan Komisaris Timeliness of submission of Opinions and Suggestions that are the obligations of Board of Commissioners		20	
	a. Pendapat dan Saran Dewan Komisaris atas RKAP 2024, Laporan Triwulanan 2024, dan Laporan Tahunan 2023 a. Board of Commissioners' Opinions and Suggestions on RKAP 2024, Quarterly Report 2024 and Annual Report 2023	Hari Kerja Working days	5	30
	b. Tanggapan atas tindakan Direksi yang harus mendapat persetujuan RUPS/Menteri b. Responses to Board of Directors' actions that must be approved by the GMS/ Minister	Hari Kerja Working days	5	14
	c. Tanggapan atas tindakan Direksi yang harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris c. Responses to Board of Directors' actions that must be approved by Board of Commissioners	Hari Kerja Working days	5	14
	d. Laporan Dewan Komisaris triwulanan dan Tahunan d. Quarterly and Annual Board of Commissioners Report	Hari Kerja Working days	5	30
3.	Rapat dan Kunjungan Kerja Dewan Komisaris Meetings and Working Visits of Board of Commissioners		18	
	a. Jumlah Rapat Internal Dewan Komisaris a. Number of Internal Meetings of Board of Commissioners	Jumlah Amount	6	12
	b. Jumlah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi b. Number of Meetings of Board of Commissioners and Board of Directors	Jumlah Amount	6	12
	c. Kunjungan Kerja Dewan Komisaris ke Cabang c. Working Visit of Board of Commissioners to the Branch	Jumlah Amount	6	7
4.	Pengawasan dan arahan terhadap Direksi atas rencana dan kebijakan Perusahaan Supervision and guidance to Board of Directors on the Company's plans and policies	Jumlah Amount	18	7
5.	Efektivitas Kegiatan Penunjang Dewan Komisaris Effectiveness of Supporting Activities of Board of Commissioners		30	
	Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris Board of Commissioners Competency Improvement			
	Pengembangan kompetensi Dewan Komisaris Board of Commissioners Competency Development	Pelaksanaan Implementation	8	4
	Efektivitas Organ Pendukung Effectiveness of Supporting Organs			
	Komite Audit Audit Committee			
	Pelaksanaan Rapat Internal Komite Audit Implementation of Internal Audit Committee Meetings	Jumlah Amount	3	12
	Laporan Penugasan Komite Audit Audit Committee Assignment Report	Laporan Report	3	4
	Komite Manajemen Risiko Risk Management Committee			
	Pelaksanaan Rapat Internal Komite PMR Implementation of PMR Committee Internal Meetings	Jumlah Amount	3	12

Key Performance Indicator

No.	Indikator Pencapaian Kinerja Performance Achievement Indicator	Satuan Unit	Bobot Weight	Target Target
	Laporan Penugasan Komite PMR PMR Committee Assignment Report	Laporan Report	3	4
	Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee			
	Pelaksanaan Rapat Internal Komite NR Implementation of NR Committee Internal Meetings	Jumlah Amount	3	12
	Laporan Penugasan Komite NR NR Committee Assignment Report	Laporan Report	3	4
	Komite Tata Kelola Terintegrasi Integrated Governance Committee			
	Pelaksanaan Rapat Komite TKT Implementation of TKT Committee Meetings	Jumlah Amount	4	4
6.	Pengawasan dan Arahan atas Rencana dan Pelaksanaan Program TJSL Supervision and Guidance on SER Program Plan and Implementation	Jumlah Amount	2	2
	Jumlah Total		**100**	

Status: Telah Terealisasi
Status: Realized

Agenda Keempat
Fourth Agenda

Persetujuan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan apabila terdapat Tindakan-tindakan yang mengakibatkan perubahan alokasi anggaran investasi dengan nilai maksimum 10% (sepuluh persen) dari nilai masing-masing program investasi sepanjang tidak mengubah total nilai investasi.
Approval of delegation of authority to the Board of Commissioners to approve if there are actions that result in changes to investment budget allocation with a maximum value of 10% (ten percent) of the value of each investment program/item as long as does.

Keputusan:
Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan apabila terdapat Tindakan-tindakan yang mengakibatkan perubahan alokasi anggaran investasi dengan nilai maksimum 10% (sepuluh persen) dari nilai masing-masing program investasi sepanjang tidak mengubah total nilai investasi.

Status: Telah Terealisasi

Resolution:
Approved the delegation of authority to the Board of Commissioners to give approval if there are actions that result in changes to the investment budget allocation with a maximum value of 10% (ten percent) of the value of each investment program/item as long as does not change the investment program/item and does not exceed the investment total value.

Status: Realized

Keterangan:
Karena seluruh saham dimiliki oleh Negara Republik Indonesia maka tidak terdapat hasil pooling setuju, tidak setuju dan abstain.
Remarks:
Because all shares are owned by the Republic of Indonesia, there are no pooling results of agree, disagree or abstain.

TINDAK LANJUT ARAHAN PEMEGANG SAHAM RUPS RKAP TAHUN 2024

FOLLOW-UP ON GMS SHAREHOLDERS' DIRECTION FOR 2024 RKAP

No.	Arahan Directions	Tindak Lanjut Follow Up
1	Melaksanakan evaluasi atas program transformasi berupa standarisasi dan digitalisasi layanan dalam rangka penajaman, pengembangan dan perbaikan sehingga dapat tercipta efisiensi operasi dan port *network connectivity* yang lebih efektif. Carry out an evaluation of the transformation program in the form of standardization and digitization of services in the context of sharpening, development and improvement so as to create more effective operational efficiency and port network connectivity.	Saat ini sedang dilakukan Post Merger Review di mana salah satu hal yang dievaluasi adalah terkait dengan Program Standarisasi dan Sistemisasi. Evaluasi dilakukan melalui site visit, data analysis, desk research, dan interview kepada pengguna jasa. Evaluasi terhadap implementasi Standarisasi dan Sistemisasi di masing-masing Subholding dilakukan terhadap 3 aspek yaitu aspek operasional, aspek keuangan, dan aspek komersial. Currently, a Post Merger Review is being conducted where one of the things being evaluated is related to the Standardization and Systemization Program. The evaluation is conducted through site visits, data analysis, desk research, and interviews with service users. The implementation of Standardization and Systemization in each Subholding is evaluated on 3 aspects, namely operational aspects, financial aspects, and commercial aspects.
2	Melanjutkan Langkah-langkah efisiensi biaya khususnya yang berada dalam kendali manajemen (*controllable*) dengan tetap menjaga produktivitas dan kualitas pelayanan serta senantiasa menjaga operating profit margin dan EBITDA margin agar dapat terealisasi sesuai target RKAP Tahun 2024. Continue cost efficiency measures, especially those that are controllable, while maintaining productivity and service quality and always maintaining operating profit margin and EBITDA margin so that they can be realized according to the 2024 RKAP target.	Saat ini sudah dilaksanakan program efisiensi hal ini ditandai dengan telah terbentuknya SK Tim efisiensi biaya serta program efisiensi di masing-masing entitas Pelindo group, selain itu juga telah dilakukan evaluasi setiap bulannya terhadap program efisiensi Currently, an efficiency program has been implemented, marked by the formation of a Cost Efficiency Team Decree and an efficiency program in each Pelindo group entity, in addition, a monthly evaluation has been carried out on the efficiency program
3	Melakukan percepatan rencana penurunan rasio IBD to Invested Capital pada tahun 2024 yang salah satunya dilakukan melalui divestasi PT Cibitung Tanjung Priok Tollways (CTP) sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi Perusahaan serta memastikan pelaksanaannya memenuhi asepek *governance, risk, and compliance* (GRC). Accelerate the plan to reduce the IBD to Invested Capital ratio in 2024, one of which is through the divestment of PT Cibitung Tanjung Priok Tollways (CTP) so that it can provide maximum benefits for the Company and ensure that its implementation meets the aspects of governance, risk, and compliance (GRC).	Saat ini sedang dilaksanakan penyelesaian di BANI atas proses transaksi sebelumnya, dan secara paralel disusun SOP baru dalam rangka akseleasi seleksi calon investor potensial sehingga proses lebih terakselerasi. Currently, BANI is completing the previous transaction process, and in parallel, a new SOP is being prepared to accelerate the selection of potential investors so that the process is more accelerated.
4	Melakukan akselerasi atas Pemumian Bisnis guna meningkatkan kinerja operasional dan finansial secara konsolidasi, koordinasi yang sistematis serta memaksimalkan organisasi yang lebih lincah, dengan tetap mengacu pada hasil *due diligence*. Accelerate business optimization to improve operational and financial performance in a consolidated manner, systematic coordination and maximizing a more agile organization, while still referring to the results of due diligence.	Proses Implementasi Pemurnian Bisnis Sedang dilakukan Akselerasi melalui pemembahasan rutin per Aksi Korprorasi pada setiap aksi korporasi. Pembahasan progress dilakukan per rencana aksi korporasi yang dilakukan secara ad hoc sesuai dengan kesiapan usulan kajian (rasionalitas, skema transaksi, uji tuntas dan valuasi), serta pembahasan rutin setiap bi-weekly dan pembahasan monthly secara keseluruhan dan dependensi antar aksi korporasi antar subholding. Secara keseluruhan, progress aksi korporasi pemurnian bisnis per 15 April 2024 telah mencapai 62% dari total 91 Aksi Korporasi yang ditargetkan selesai seluruhnya pada tahun 2024 ini. The Business Purification Implementation Process is being accelerated through routine discussions per Corporate Action for each corporate action. Discussion of progress is carried out per corporate action plan on an ad hoc basis in accordance with the readiness of proposed study (rationality, transaction scheme, due diligence and valuation), as well as routine discussions every bi-weekly and monthly discussions as a whole and dependencies of corporate actions between subholdings. Overall, the progress of business purification corporate action as of April 15, 2024 has reached 62% of the total 91 Corporate Actions targeted to be completed in 2024.

No.	Arahan Directions	Tindak Lanjut Follow Up
5	Pelaksanaan investasi agar memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan sehubungan dengan beberapa utang yang jatuh tempo pada tahun 2024, berpedoman pada rencana (*cost & schedule*), serta melakukan prioritisasi sehingga Capex menjadi lebih efisien utamanya untuk menyeimbangkan arus kas. Investment implementation should pay attention to the Company's financial capacity in relation to several debts due in 2024, be guided by the plan (cost & schedule), and prioritize so that Capex becomes more efficient, primarily to balance cash flow.	Dalam pengelolaan investasi, telah dilakukan upaya optimalisasi pada perencanaan dan pelaksanaan. Dalam perencanaan investasi, terhadap semua usulan investasi yang diajukan, dilakukan evaluasi terhadap aspek kebutuhan dan nilai pengajuan, serta mempertimbangkan kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan dalam pembiayaan investasi serta rencana tahun 2024 yang berdampak kepada kondisi arus kas. Koordinasi dilakukan oleh Unit Manajemen Investasi, Tim RKAP Investasi dengan Unit Pengelolaan Keuangan di mana informasi kebijakan keuangan terkait menjadi salah satu acuan dalam mengevaluasi nilai-nilai investasi. Selanjutnya akan dihasilkan item-item usulan investasi yang dapat direkomendasikan beserta nilai yang dapat disetujui, serta prioritisasinya. Dalam tahap pelaksanaan, mulai TW 1 Tahun 2024 telah dimulai optimalisasi investasi 2024 dengan monitoring atas progres pelaksanaan, perkiraan potensi realisasinya sampai akhir tahun dan peluang untuk dilakukan optimalisasi atas kebutuhan dana investasi pada tahun 2024. In investment management, optimization efforts have been made in planning and implementation. In investment planning, for all investment proposals submitted, an evaluation is carried out on the aspects of needs and proposal value, and considering the Company's financial conditions and capabilities in financing investments and the 2024 plan which has an impact on cash flow conditions. Coordination is carried out by the Investment Management Unit, the Investment RKAP Team with the Financial Management Unit where related financial policy information is one of the references in evaluating investment values. Furthermore, investment proposal items that can be recommended will be produced along with the values that can be approved, as well as their prioritization. In the implementation stage, starting in Q1 2024, the optimization of 2024 investments has begun with monitoring of implementation progress, estimates of potential realization until the end of the year and opportunities to optimize investment fund needs in 2024.
6	Memprioritaskan percepatan penyelesaian proyek investasi terutama Proyek Strategis Nasional (PSN) yang sudah berjalan agar dapat diselesaikan pada tahun 2024, serta melakukan Langkah-langkah percepatan Pembangunan terhadap proyek-proyek yang belum dimulai pembangunannya. Prioritize the acceleration of investment projects completion, especially ongoing National Strategic Projects (PSN), so that they can be completed in 2024, and take steps to accelerate development of projects that have not yet begun construction.	Dalam rangka percepatan penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN), saat ini telah dilakukan koordinasi secara berkala baik di internal PT Pelabuhan Indonesia dan pihak eksternal untuk menyelesaikan isu - isu yang menghambat progres pekerjaan. Koordinasi internal berfokus kepada aspek hukum, izin - zin dan administrasi terkait yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan, sedangkan koordinasi eksternal dilakukan dengan berfokus kepada kinerja pelaksana pekerjaan dan asistensi terhadap stakeholder terkait. Salah satu contohnya upaya percepatan pekerjaan pengerukan pada Proyek BMTH dengan menerbitkan PK3 (Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk) paralel dengan pengurusan Addendum AMDAL namun dengan catatan PK3 berlaku setelah Addendum AMDAL disahkan. Selain itu, saat ini telah disepakati action plan pada masing - masing proyek untuk kemudian dapat dijadikan komitmen bersama dalam rangka mempercepat progres pekerjaan. In order to accelerate the completion of the National Strategic Project (PSN), regular coordination has been carried out both internally at PT Pelabuhan Indonesia and external parties to resolve issues that hinder the work progress. Internal coordination focuses on legal aspects, permits and related administration needed to support the work implementation, while external coordination is carried out by focusing on the performance of work implementers and assistance to related stakeholders. One example is the effort to accelerate dredging work on the BMTH Project by issuing PK3 (Dredging Work Activity Approval) in parallel with the management of AMDAL Addendum but with the note that PK3 applies after AMDAL Addendum is ratified. In addition, an action plan has been agreed upon for each project which can then be used as a joint commitment in order to accelerate the progress of the work.

No.	Arahan Directions	Tindak Lanjut Follow Up
7	Melakukan evaluasi atas kinerja dan menerapkan strategi pemasaran yang efektif dalam pengelolaan dan komersialisasi terutama untuk Pelabuhan-pelabuhan baru seperti Kijing, Kuala Tanjung, Bali Maritime Tourism Hub dan Makassar New Port.	"Evaluasi bisnis terhadap kinerja pengembangan pelabuhan-pelabuhan tersebut tetap dilakukan seiring perkembangan bisnis didalam internal group Pelindo, berdasarkan strategi dalam buku putih Pelindo (after Merger) bahwa pelaksanaan komersialisasi dan optimalisasi atas pelabuhan-pelabuhan baru tersebut dilaksanakan oleh Subholding sesuai core bisnisnya. Sebagai contoh: 1. Pelabuhan Kijing : a. untuk kegiatan operasional terminal kijing dilakukan oleh PTP Multipurpose (SPMT Group) b. terkait lahan pendukung terminal kijing dilakukan oleh SPSL sebagai pengelola kasawan (telah berproses kerja sama pemanfaatan lahan oleh beberapa mitra) 2. Bali Maritime Tourism Hub: a. Area Pengembangan 1 (AP 1): Telah ditugaskan kepada SPSL untuk pengelolaan lahan dan sedang dalam persiapan kerjasama dengan mitra untuk menjalankan bisnis, diantaranya: zona bisnis marina (yacht club), entertainment, lifestyle, serta rencana pemanfaatan taman & atraksi b. Area Pengembangan 2 (AP 2): • Terkait zona terminal oil & gas, SPMT bersama konsorsium akan menjalankan bisnis midstream LNG kepada mitra eksisting (PLN Group) sebagai komitmen Pelindo dalam rangka mendukung penyediaan energi bersih • Terkait zona logistik, SPSL akan mengoptimalkan area logistik sebagai back up area terminal • Terkait zona terminal curah lainnya Pelindo telah mengikat kerjasama dengan PT Pertamina Patra Niaga dalam rangka mendukung penyaluran BBM & Avtur, selain itu juga ada beberapa potensial mitra lainnya untuk bekerjasama dalam rangka optmaliasi terminal c. Terminal Passengers (Cruise Terminal) Dengan adanya pengembangan fasilitas dermaga timur serta dermaga selatan, Pelindo sangat attractive dalam rangka pengembangan pasar bisnis cruise, hal ini selaras tujuan BMTH dalam rangka mendukung program pariwisata, dimana BMTH (Pelabuhan Benoa) sebagai Home Port Cruise di Indonesia 3. Makassar New Port: Makassar New Port telah dioperasikan oleh Subholding Pelindo SPTP a. Tahap 1A telah beroperasi sejak tahun 2020 sedangkan Tahap 1B dan 1C beroperasi sejak Februari 2024 b. Dalam tahap persiapan pemilihan calon mitra pengembangan dan pengoperasian MNP 4. Kuala Tanjung: a. Telah dilakukan kegiatan komersialisasi terkait untuk area Pelabuhan dan Kawasan Industri Kuala Tanjung, hal ini direalisasikan dengan adanya MoU kerjasama Pengembangan Pelabuhan dan Kawasan Industri Kuala Tanjung dengan pihak Zhejiang Seaport Group asal Tiongkok dan progres NDA kerjasama serupa dengan pihak Adani Group asal India b. Selain pihak tersebut diatas, juga telah dilakukan beberapa penjajakan dan kegiatan site visit oleh calon mitra terkait untuk kerjasama pemanfaatan lahan dengan tim PT Pelindo Group dan PT Prima Multi Terminal selaku operator Pelabuhan Kuala Tanjung juga PT Prima Pengembangan Kawasan selaku pengelola Kawasan Industri Kuala Tanjung"

No.	Arahan Directions	Tindak Lanjut Follow Up
	Evaluate performance and implement effective marketing strategies in management and commercialization, especially for new ports such as Kijing, Kuala Tanjung, Bali Maritime Tourism Hub and Makassar New Port.	"Business evaluation on the performance of the development of these ports continues to be carried out along with business developments within Pelindo group, based on the strategy in Pelindo white paper (after Merger) that the implementation of commercialization and optimization of these new ports is carried out by Subholding according to its core business. For example: 1. Kijing Port: a. for operational activities of Kijing terminal carried out by PTP Multipurpose (SPMT Group) b. related to the supporting land for Kijing terminal carried out by SPSL as the area manager (has been in the process of land use cooperation by several partners) 2. Bali Maritime Tourism Hub: a. Development Area 1 (AP 1): Has been assigned to SPSL for land management and is in preparation for cooperation with partners to run the business, including: marina business zone (yacht club), entertainment, lifestyle, and plans to utilize parks & attractions b. Development Area 2 (AP 2): • Related to the oil & gas terminal zone, SPMT together with the consortium will run the LNG midstream business to existing partners (PLN Group) as Pelindo's commitment to support the provision of clean energy • Regarding the logistics zone, SPSL will optimize the logistics area as a back up area for the terminal • Regarding other bulk terminal zones, Pelindo has signed a cooperation agreement with PT Pertamina Patra Niaga in order to support the distribution of BBM & Avtur, in addition there are also several other potential partners to cooperate in order to optimize the terminal c. Passengers Terminal (Cruise Terminal) With the development of east dock and south dock facilities, Pelindo is very attractive to develop the cruise business market, this is in line with BMTH's goal to support the tourism program, where BMTH (Benoa Port) is the Home Port Cruise in Indonesia 3. Makassar New Port: a. Makassar New Port has been operated by Pelindo SPTP Subholding b. Phase 1A has been operating since 2020 while Phases 1B and 1C have been operating since February 2024 c. In the preparation stage for selecting prospective partners for the development and operation of MNP 4. Kuala Tanjung: a. Commercialization activities related to Kuala Tanjung Port and Industrial Area area have been carried out, realized with the MoU for cooperation in the Development of Kuala Port and Industrial Area Tanjung with Zhejiang Seaport Group from China and progress of similar NDA cooperation with Adani Group from India b. In addition to the above parties, several explorations and site visit activities have also been carried out by prospective partners related to land use cooperation with PT Pelindo Group and PT Prima Multi Terminal teams as the operator of Kuala Tanjung Port and PT Prima Pembangunan Kawasan as the manager of Kuala Tanjung Industrial Estate"

No.	Arahan Directions	Tindak Lanjut Follow Up
8	Meningkatkan penguasaan pangsa pasar di luar Pelindo Group terutama untuk segmen pendapatan non petikemas dan logistic sebagai bagian dari inisiatif strategis business expansion di tahun 2024. Increase market share outside the Pelindo Group, especially for the non-container and logistics revenue segment as part of the strategic business expansion initiative in 2024.	"Terkait ekspansi bisnis Pelindo dalam rangka peningkatan market share diluar Pelindo, berdasarkan rencana program ekspansi bisnis 2024 berikut beberapa Inisiatif Strategis dalam segmen Non Petikemas & Logistik: 1. Pengembangan layanan TUKS (bekerja sama dengan BUMN & Swasta) 2. Optimalisasi layanan operasi Pelabuhan milik Kementerian/Lembaga (mayoritas pelabuhan non-petikemas) 3. Ekspansi bisnis dalam segmen Marine, Equipment & Port Services: a. Pengelolaan alur pelayaran b. Pengelolaan Bisnis STS (Ship-to-ship Transfer) c. Layanan On-shore power supply d. Waste Management e. Peningkatan kapasaitas shipyard, bunkering dan lainnya 4. Kerja sama dengan kasawan industri/logistik 5. Pengembangan marina-based tourism" "Regarding Pelindo's business expansion to increase market share outside Pelindo, based on the 2024 business expansion program plan, here are some Strategic Initiatives in the Non-Container & Logistics segment: 1. Development of TUKS services (in collaboration with SOEs & Private) 2. Optimization of Port operation services owned by Ministries/Institutions (the majority of non-container ports) 3. Business expansion in the Marine, Equipment & Port Services segment: a. Shipping lane management b. STS (Ship-to-ship Transfer) Business Management c. On-shore power supply services d. Waste Management e. Increasing shipyard capacity, bunkering and others 4. Cooperation with industrial/logistics sectors 5. Development of marina-based tourism"
9	RKAP yang disahkan merupakan pedoman bagi Direksi dalam menjalankan kegiatan usaha dan pedoman bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan perusahaan tahun 2024 dan berkomitmen untuk mencapai target-target RKAP 2024 dan *key Performance Indicator* (KPI) tahun 202RKAP tersebut agar dirinci menjadi program dan target bulanan dan triwulanan untuk memudahkan *monitoring* dan evaluasi pencapaiannya, dan dilakukan cascading ke seluruh jajaran Perusahaan, serta dalam pelaksanannya senantiasa berpedoman pada prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). The approved RKAP is a guideline for Board of Directors in carrying out business activities and a guideline for Board of Commissioners in carrying out Company supervision duties in 2024 and is committed to achieving the 2024 RKAP targets and key performance indicators (KPI) in 202The Company Budget and Work Plan (RKAP) should be broken down into monthly and quarterly programs and targets to facilitate monitoring and evaluation of achievements, and cascading to all levels of the Company, and in its implementation always guided by the principles of Good Corporate Governance (GCG).	Telah dilakukan pengesahan Kontrak Manajemen yang memuat KPI Direksi secara Kolegial Tahun 2024, serta telah dilakukan cascading KPI ke jajaran Perusahaan serta unit di bawahnya yaitu melalui pengesahan Kontrak Manajemen yang memuat atas KPI Direksi secara Individual, KPI Group, KPI Regional, KPI Subholding, dan KPI Anak Perusahaan Non Cluster Tahun 2024 dengan target-target yang sesuai dengan RKAP 202Selanjutnya akan dilakukan monitoring realisasi KPI secara berkala. The ratification of the Management Contract containing the Board of Directors' KPIs collegially in 2024 has been carried out, and KPI cascading has been carried out to the Company's ranks and units below it, namely through the ratification of the Management Contract containing the Board of Directors' KPIs individually, Group KPIs, Regional KPIs, Subholding KPIs, and Non-Cluster Subsidiary KPIs in 2024 with targets in accordance with the 2024 RKAP. Furthermore, periodic monitoring of KPI realization will be carried out.

No.	Arahan Directions	Tindak Lanjut Follow Up
10	Direksi agar menindaklanjuti dan menyelesaikan secara tuntas temuan, serta saran dan rekomendasi auditor, baik auditor eksternal (BPK RI dan/atau KAP) maupun auditor internal (SPI) di tahun 2023 maupun tahun-tahun sebelumnya. Tindak lanjut penyelesaian temuan/saran auditor agar dibahas secara komprehensif dengan Dewan Komisaris dan dilaporkan secara tertulis kepada Pemegang Saham. Board of Directors to follow up and fully resolve the findings, as well as the suggestions and recommendations of the auditors, both external auditors (BPK RI and/or KAP) and internal auditors (SPI) in 2023 and previous years. Follow-up on the resolution of the auditor's findings/ suggestions to be discussed comprehensively with Board of Commissioners and reported in writing to Shareholders.	Telah dilakukan monitoring tindak lanjut terhadap rekomendasi audit internal bersama auditee dan telah dilakukan koordinasi serta menyampaikan tindak lanjut atas rekomendasi audit eksternal secara berkala bersama KAP dan BPK. Follow-up monitoring of internal audit recommendations has been carried out with the auditee, coordination has been carried out, and follow-up to external audit recommendations has been submitted periodically with KAP and BPK. And the results of monitoring are reported through quarterly management reports.
11	Menyampaikan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik selambat-lambatnya minggu ke 1 (kesatu) April 2024 dan melakukan Audit Upon Procedure (AUP) atas paket informasi laporan audit dan selanjutnya menyampaikan beserta laporan audit paling lambat minggu ke 2 (kedua) April 2024. Submit the Company's Annual Report including the Financial Statements for 2023 Fiscal Year which have been audited by a Public Accounting Firm no later than the first week of April 2024 and conduct an Audit Upon Procedure (AUP) on the information package of audit report and then submit it along with the audit report no later than the second week of April 2024.	Telah diselesaikan laporan audit perseroan tahun buku 2023 yang telah rilis di tanggal 27 Maret 2024 dan telah disampaikan kepada pemegang saham. Terkait audit upon porsedure (AUP) atas paket informasi laporan audit sedang proses pembuatan dengan pihak auditor dan ditargetkan selesai di bulan April 2024. The company's audit report for the 2023 fiscal year has been completed, which was released on March 27, 2024 and has been submitted to shareholders. Regarding the audit upon procedure (AUP) for the audit report information package, is in the process of being prepared with the auditor and is targeted for completion in April 2024.
12	Surat Menteri BUMN No: 491/MBU/09/2023 tanggal 29-09-2023 (dua puluh sembilan September dua ribu dua puluh tiga) perihal Aspirasi Pemegang Saham untuk Penyusunan RKAP Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), Buku RKAP 2024 (dua ribu dua puluh empat), surat Dewan Komisaris Nomor:01/DK/PI/I-2024 tanggal 03-01-2024 (tiga Januari dua ribu dua puluh empat) perihal Tanggapan atas Usulan RKAP Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) Key Performance Indicators (KPI) Direksi secara Kolegial yang tertuang dalam Kontrak Manajemen dan KPI Dewan Komisaris, serta Risalah Rapat TJSL Nomor: RIS-18/DSI.MBU.B/12/2023 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini dan agar mendapat perhatian serius serta ditindaklanjuti. Letter of the Minister of SOEs No: 491/ MBU/09/2023 dated 29-09-2023 (twenty-ninth of September two thousand twenty-three) concerning Shareholders' Aspirations for the Preparation of 2024 (two thousand twenty-four) RKAP, 2024 (two thousand twenty-four) RKAP Book, letter of Board of Commissioners Number: 01/DK/PI/I-2024 dated 03-01-2024 (third of January two thousand twenty-four) concerning Response to the Proposed 2024 (two thousand twenty-four) RKAP Key Performance Indicators (KPI) of Board of Directors Collegially as stated in the Management Contract and KPI of Board of Commissioners, as well as the Minutes of CSR Meeting Number: RIS-18/DSI.MBU.B/12/2023 are an inseparable part of this decision and must receive serious attention and be followed up.	Telah diselesaikan pengesahan Kontrak Manajemen yang memuat KPI Direksi secara Kolegial Tahun 2024 sesuai dengan Aspirasi Pemegang Saham untuk Penyusunan RKAP Tahun 2024 pada Rapat Umum Pemegang Saham Pelindo tanggal 29 Januari 2024. The ratification of the Management Contract containing the Board of Directors' KPIs collegially for 2024 has been completed in accordance with the Shareholders' Aspirations for the Preparation of 2024 RKAP at Pelindo General Meeting of Shareholders on January 29, 2024.

PELAKSANAAN RUPS TAHUNAN TENTANG PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN TAHUN BUKU 2023 DAN REALISASINYA

Pelaksanaan RUPS dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Selasa/04 Juni 2024
Waktu : 10.00 – 11.00 WIB
Tempat : Pelindo Tower Lantai 5, Jakarta Utara

ANNUAL GMS ON APPROVAL OF FISCAL YEAR 2023 ANNUAL REPORT AND THE REALIZATION

The GMS was held on:
Day/Date : Tuesday, June 4, 2024
Time : 10.00 – 11.00 WIB
Place : Pelindo Tower 5th Floor, Jakarta

REKAPITULASI KEHADIRAN PADA RUPS TAHUNAN TENTANG PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN TAHUN BUKU 2023 DAN REALISASINYA

RECAPITULATION OF ATTENDANCE AT THE ANNUAL GMS ON APPROVAL OF FISCAL YEAR 2023 ANNUAL REPORT AND THE REALIZATION

No	Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance
1	Agus Suhartono	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner and Independent Commissioner	Hadir Present
2	Jodi Mahardi	Komisaris Commissioner	Hadir Present
3	Andus Winarno	Komisaris Commissioner	Hadir Present
4	Heru Sukanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Hadir Present
5	Sudung Situmorang	KoIndependent Commissionermisaris Independen	Hadir Present
6	Didi Sumedi	Komisaris Commissioner	Tidak Hadir Not Present
7	Arif Toha Tjahjagama	Komisaris Commissioner	Hadir Present
8	Arif Suhartono	Direktur Utama President Director	Hadir Present
9	Hambra	Wakil Direktur Utama Vice President Director	Hadir Present
10	Ihsanuddin Usman	Direktur SDM dan Umum Human Resources and General Affairs Director	Hadir Present
11	Boy Robyanto	Direktur Investasi Investment Director	Hadir Present
12	Mega Satria	Direktur Keuangan Finance Director	Hadir Present
13	Prasetyo	Direktur Strategi Strategy Director	Hadir Present
14	Putut Sri Muljanto	Direktur Pengelola Managing Director	Hadir Present

PIHAK INDEPENDEN

Pelindo telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Nanda Fauz Iwan dalam menyusun Akta hasil RUPS.

INDEPENDENT PARTY

Pelindo has appointed an independent party, namely Notary Nanda Fauz Iwan, to draw up the GMS Resolution Deed.

KEPUTUSAN DAN REALISASI RUPS TAHUNAN TENTANG PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN TAHUN BUKU 2023

RESOLUTION AND REALIZATION OF THE GMS ON APPROVAL OF FISCAL YEAR 2023 ANNUAL REPORT

Agenda Pertama
First Agenda

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan, Persetujuan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program pendanaan usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2023, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas Tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023.

Approval of the Annual Report and Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements, Approval of the Supervisory Duties of Board of Commissioners and Ratification of Financial Statements of Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for Fiscal Year 2023, as well as granting full release and discharge (volledig acquit et de charge) to Board of Directors for the management actions and to Board of Commissioners for the supervisory actions carried out during Fiscal Year 2023.

Keputusan:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk Tahun Buku 2023.
2. Mengesahkan:
   a. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31-12-2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) sesuai laporannya Nomor: 00379/2.1032/AU.1/06/0697-4/1/III/2024 tanggal 27-03-2024 dengan opini "wajar, dalam semua hal yang material".
   b. Laporan Keuangan Program PUMK untuk Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) sesuai laporannya Nomor 00598/2.1032/AU.2/10/0697-4/1/III/2024 tanggal 27-03-2024 dengan opini "wajar, dalam semua hal yang material".

   Pokok-pokok Laporan Keuangan Konsolidasian PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Tahun Buku 2023 sebagai berikut:
   a. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
      PT Pelabuhan Indonesia (Persero) untuk tahun yang berakhir tanggal 31-12-2023 ditutup dengan:
      - Total Aset sebesar Rp118.341.065.674.287,00 (serratus delapan belasa triliun tiga ratus emapt puluh satu miliar enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah).
      - Total Liabilitas sebesar Rp71.499.850.516.511,00 (tujuh puluh satu triliun empat ratus sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh juta lima ratus enam belas ribu lima ratus sebelas rupiah).
      - Ekuitas Rp46.841.215.157.776,00 (empat puluh enam triliun delapan ratus empat puluh satu miliar dua ratus lima belas juta serratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah).
   b. Laporan Laba (Rugi) Konsolidasian
      Laba Setelah Pajak Konsolidasian PT Pelabuhan Indonesia (Persero) untuk tahun yang berakhir tanggal 31-12-2023 sebesar Rp4.012.581.262.711,00 (empat triliun dua belas miliar lima ratus delapan puluh satu juta dua ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus sebelas rupiah).

   Pokok-pokok Laporan Keuangan Program PUMK PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Tahun Buku 2023 sebagai berikut:
   a. Posisi Keuangan Program PUMK per 31-13-2023 ditutup dengan jumlah Aset Bersih sebesar Rp135.244.842.501,00 (serratus tiga puluh lima miliar dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus satu rupiah.
   b. Efektivitas Penyaluran Dana Program PUMK
   c. Realisasi dana Program PUMK per 31-12-2023 ditutup dengan jumlah Dana Tersedia sebesar Rp48.912.991.575,00 (empat puluh delapan miliar sembulan ratus dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) dan jumlah Dana Disalurkan sebesar Rp23.880.295.155,00 (dua puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu serratus lima puluh lima rupiah).
3. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK), seluruhnya untuk Tahun Buku 2023, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledif acquit et de charge) kepada seluruh Anggota Direksi atas Tindakan pengurusan Perseroan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas Tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023, sepanjang Tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan peraturan Perundang-Undangan dan prosedur hukum yang berlaku, dan telah tercermin dalam laporan-laporan tersebut di atas.

Agenda Pertama
First Agenda

Resolution:
1. To approve the Company's Annual Report including the Board of Commissioners Supervisory Report and Social and Environmental Responsibility Implementation Report for Fiscal Year 2023.
2. To ratify:
   a. The Company's Consolidated Financial Statements for Fiscal Year 2023 ending on 12-31-2023, which have been audited by Public Accounting Firm (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) according to their report Number: 00379/2.1032/AU.1/06/0697-4/1/III/2024 dated 03-27-2024 with an opinion of "fair, in all material respects".
   b. The PUMK Program Financial Report for Fiscal Year 2023 ending on 12-31-2023 which has been audited by Public Accounting Firm (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) according to report Number 00598/2.1032/AU.2/10/0697-4/1/III/2024 dated 03-27-2024 with the opinion "fair, in all material respects".

   The main points of Consolidated Financial Statements of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) for Fiscal Year 2023 are as follows:
   a. Statement of Financial Position
      PT Pelabuhan Indonesia (Persero) for the year ending 12/31/2023 closed with:
      - Total Assets of Rp118,341,065,674,287.00 (one hundred eighteen trillion three hundred forty-one billion sixty-five million six hundred seventy-four thousand two hundred eighty-seven rupiah).
      - Total Liabilities amounting to Rp71,499,850,516,511.00 (seventy-one trillion four hundred ninety-nine billion eight hundred fifty million five hundred sixteen thousand five hundred eleven rupiah).
      - Equity of Rp46,841,215,157,776.00 (forty-six trillion eight hundred forty-one billion two hundred fifteen million two hundred fifty-seven thousand seven hundred seventy-six rupiah).
   b. Consolidated Profit (Loss) Report
      Consolidated Profit After Tax of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) for the year ending 12-31-2023 amounted to Rp4,012,581,262,711.00 (four trillion twelve billion five hundred eighty-one million two hundred sixty-two thousand seven hundred eleven rupiah).

   The main points of the PUMK Program Financial Report of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) for Fiscal Year 2023 are as follows:
   a. The PUMK Program Financial Position as of 12-31-2023 closed with a total Net Asset of Rp135,244,842,501.00 (one hundred thirty-five billion two hundred forty-four million eight hundred forty-two thousand five hundred one rupiah).
   b. Effectiveness of PUMK Program Fund Distribution
   c. The realization of PUMK Program funds as of 12-31-2023 is closed with the amount of Available Funds of Rp48,912,991,575.00 (forty-eight billion nine hundred twelve million nine hundred ninety-one thousand five hundred seventy-five rupiah) and the amount of Disbursed Funds of Rp23,880,295, 155.00 (twenty-three billion eight hundred and eighty million two hundred and ninety-five thousand and five hundred and fifty rupiah).
3. With the approval of Annual Report including the Board of Commissioners Supervisory Report, and ratification of the Company Financial Report and Micro and Small Business Funding Program (PUMK) Financial Report, for Fiscal Year 2023, the GMS grants full release and discharge (volledig acquit et de charge) to all members of Board of Directors for the management actions of the Company and to all members of Board of Commissioners for supervisory actions carried out during the fiscal year ending on 12-31-2023, as long as these actions do not constitute a criminal offense and/or violate the provisions of laws and regulations and applicable legal procedures, and have been reflected in the aforementioned reports.

Agenda Kedua
Second Agenda

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023
Determination of the use of the Company's net profit for fiscal year 2023.

Keputusan:
Menetapkan penggunaan Laba Bersih Atribusi Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun Buku 2023 sebesar Rp3.822.122.282.641,00 (tiga triliun delapan ratus dua puluh dua miliar serratus dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) sebagai berikut:
1. Sebesar 27,17% dari laba bersih atau sebesar Rp1.038.470.000.000,00 (satu triliun tiga puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) ditetapkan sebagai dividen tunai.
2. Sebesar 72,83% dari laba bersih atau sebesar Rp2.783.652.282.641,00 (dua triliun tujuh rartus delapan puluh tiga miliar enam ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) ditetapkan sebagai cadangan.

Resolution:
To determine the use of the Net Income Attribution of Owner of the Company's Parent Entity for Fiscal Year 2023 amounting to Rp3,822,122,282,641.00 (three trillion eight hundred twenty-two billion two hundred eighty-two million six hundred forty-one rupiah) as follows:
1. 27.17% of the net profit or Rp1,038,470,000,000.00 (one trillion thirty-eight billion four hundred seventy million rupiah) is set as cash dividends.
2. 72.83% of the net profit or amounting to Rp2,783,652,282,641.00 (two trillion seven hundred eighty-three billion six hundred fifty-two million two hundred eighty-two thousand six hundred forty-one rupiah) is set as a reserve.

Agenda Ketiga
Third Agenda

Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas, dan tunjangan) Tahun 2024, dan Tantiem Tahun Buku 2023 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Determination of Remuneration (salary/honorarium, facilities, and allowances) for Fiscal Year 2024, and Tantiem for Fiscal Year 2023 for Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.

Keputusan:
Besaran Tantiem bagi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun Buku 2023, Gaji bagi Direksi dan Honorarium bagi Dewan Komisaris berikut fasilitas dan tunjangan untuk Tahun 2024 akan ditetapkan secara tersendiri.
Resolution:
The amount of Tantiem for Board of Commissioners and Board of Directors for Fiscal Year 2023, Salary for Board of Directors and Honorarium for Board of Commissioners along with facilities and benefits for 2024 will be determined separately.

Agenda Keempat
Fouth Agenda

Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) serta Non PUMK untuk Tahun Buku 2024.
Appointment of Public Accounting Firm (KAP) to audit the Company's Consolidated Financial Statements and the Financial Statements and Implementation of Micro and Small Business Funding Program (PUMK) and Non-PUMK for Fiscal Year 2024.

Keputusan:
1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) untuk melakukan audit umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024 dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Perseroan serta Non PUMK untuk Tahun Buku 2024.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2024 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan.
3. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (Emst & Young) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) dan laporan lainnya untuk Tahun Buku 2024, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

Resolution:
1. To appoint Public Accounting Firm (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) to conduct a general audit of the Company's Consolidated Financial Statements for Fiscal Year 2024 (two thousand twenty-three) and Financial Statements of the Company's Micro and Small Business Funding Program (PUMK) and Non PUMK for Fiscal Year 202
2. To authorize Board of Commissioners of the Company to appoint a Public Accounting Firm and/or Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for other periods in Fiscal Year 2024 for the purpose and interest of the Company.
3. To delegate authority to Board of Commissioners to determine the amount of audit fees, additional scope of work required and other reasonable requirements for the Public Accounting Firm, as well as to determine a replacement Public Accounting Firm in the event that the Public Accounting Firm (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (Emst & Young) for any reason is unable to complete the audit of the Company's Consolidated Financial Statements as well as the Financial Report and Implementation of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) and other reports for Fiscal Year 2024, including determining the audit fees and other requirements for the replacement Public Accounting Firm.

Agenda Kelima
Fifth Agenda

Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara.
Report on the Realization of Additional Use of State Equity Participation Funds.

Keputusan:
Menerima Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) yang berasal dari APBN Tahun Anggaran 2021 untuk periode Tahun Buku 2023 dengan ketentuan semua kegiatan dan penggunaan telah sesuai dengan Kajian Bersama PMN dan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, sepanjang tidak ditemukan adanya penyimpangan di kemudian hari
Resolution:
To accept the Report on the Realization of Additional Use of State Equity Capital Funds (PMN) originating from the State Budget for Fiscal Year 2021 for the period of Fiscal Year 2023 provided that all activities and uses are in accordance with the Joint Study of PMN and the Minister of SOEs Regulation Number: PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, provided that no deviations are found in the future.

Keterangan
Karena seluruh saham dimiliki oleh Negara Republik Indonesia maka tidak terdapat hasil pooling setuju, tidak setuju dan abstain.

Remarks:
Because all shares are owned by the Republic of Indonesia, there are no pooling results of agree, disagree or abstain.

TINDAK LANJUT ARAHAN PEMEGANG SAHAM RUPS TAHUNAN TENTANG PENGESAHAN LAPORAN TAHUNAN TAHUN BUKU 2023

FOLLOW-UP ON GMS SHAREHOLDERS' DIRECTION FOR RATIFICATION OF ANNUAL REPORT FOR FISCAL YEAR 2023

No.	Arahan Direction	Tindak Lanjut Follow-Up
1	Memastikan implementasi standarisasi dan digitalisasi operasi Pelabuhan memiliki keandalan sistem yang optimal dan kemudahan penggunaan bagi pelanggan dalam rangka peningkatan kualitas layanan kepelabuhanan. Ensure the implementation of standardization and digitization of port operations to have optimal system reliability and ease of use for customers in order to improve the quality of port services.	Telah dilaksanakan Standarisasi dan Digitalisasi Operasi Pelayanan Petikemas dan Non Petikemas di 34 Cabang/ Terminal pada Tahun 2023. Program Standarisasi dan Digitalisasi Operasi Pelabuhan akan terus dilanjutkan pada seluruh Cabang/ Terminal di Pelindo Group. Standardization and Digitalization of Container and Non-Container Service Operations have been implemented at 34 Branches/Terminals in 2023. The Port Operations Standardization and Digitalization program will continue at all Branches/Terminals in Pelindo Group.
2	Mengupayakan peningkatan pendapatan usaha dari seluruh segmen usaha terutama untuk segmen pendapatan usaha yang capaiannya berada di bawah RKAP Tahun 2023 yaitu pelayanan non petikemas, pengusahaan properti, air, dan listrik serta pelayanan rupa-rupa usaha dengan mempertahankan pangsa pasar eksisting maupun menciptakan pertumbuhan baru. Strive to increase business income from all business segments, especially for business income segments whose achievements are below the 2023 RKAP, namely non-container services, property, water, and electricity services, and various business services by maintaining the existing market share and creating new growth.	Telah dilakukan peningkatan program optimalisasi lahan idle Tahun 2023 di masing-masing Regional dengan realisasi lahan idle yang telah dikomersialisasikan sebanyak 6 lokasi yaitu : PT Adhya Sejahtera Boga Perkasa (Belawan), PT Bintang Lestari Konstruksi (Sibolga), PT Nusantara Nabati Indonesia (Belawan), PT Khatulistiwa Raya Cakrawala (Kijing), PT Pasific Bio Energy (Kijing), dan PT Permata Sawit Mas (Manokwari) The idle land optimization program has been enhanced in 2023 in each Region, with the realization of idle land that has been commercialized in 6 locations: PT Adhya Sejahtera Boga Perkasa (Belawan), PT Bintang Lestari Konstruksi (Sibolga), PT Nusantara Nabati Indonesia (Belawan), PT Khatulistiwa Raya Cakrawala (Kijing), PT Pasific Bio Energy (Kijing), and PT Permata Sawit Mas (Manokwari).
3	Melakukan Langkah-langkah antisipasi dan akuisisi pasar dalam neghadapi persaingan usaha dengan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) Swasta pada segmen bisnis Pelayanan Barang dan Petikemas. To take anticipatory measures and market acquisition in the face of business competition with Private Port Business Entities (BUP) in the Goods and Container Services business segment.	Telah dilakukan profilling dan monitoring suara pelanggan serta penjajakan dan perikatan kerjasama dengan cargo owner baru Profiling and monitoring of customer feedback, as well as exploration and collaboration with new cargo owners, have been conducted.
4	Melanjutkan Langkah-langkah efisiensi biaya khususnya yang berada dalam kendali manajemen dan memastikan efektivitas atas peningkatan biaya yang terjadi dengan tetap menjaga produktivitas dan standar kualitas pelayanan, sehingga pertumbuhan pendapatan usaha dapat terealisasi lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan beban usaha, serta menjaga rasio biaya operasional dan EBITDA margin agar tetap terkendali. Continue cost efficiency measures, especially those under management control, and ensure the effectiveness of cost increases while maintaining productivity and service quality standards, so that business income growth can be realized higher than business expense growth, and keep the operating cost ratio and EBITDA margin under control.	Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi setiap bulannya terhadap program efisiensi semua entitas Pelindo Group Monthly monitoring and evaluation of the efficiency programs of all Pelindo Group entities have been carried out.
5	Melakukan restrukturisasi PT Cibitung Tanjung Priok Tollways (CTP) dalam rangka memperbaiki rasio IBD to Invested Capital dan menurunkan Beban Keuangan pada tahun 2024. Restructuring PT Cibitung Tanjung Priok Tollways (CTP) to improve the IBD to Invested Capital ratio and reduce Financial Expenses by 2024.	Meningkatkan efektifitas proses divestasi kepemilikan saham pada CTP kepada calon investor potensial yang kredibel melalui prosedur direct selling Improving the effectiveness of CTP share divestment process to credible potential investors through direct selling procedures.

No.	Arahan Direction	Tindak Lanjut Follow-Up
6	Melakukan *stress test* secara periodik dan mitigasi risiko terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing, maupun faktor risiko lainnya, agar arus kas perusahaan mampu untuk melakukan pembayaran kewajibam, dan memenuhi modal kerja perusahaan secara *sustainable,* sehinggi kinerja keuangan dapat terkelola dengan lebih baik. Conduct periodic stress tests and risk mitigation against foreign exchange fluctuations and other risk factors, so that the Company's cash flow is sufficient to make payments and sustainably fulfill the Company's working capital, so that financial performance can be better managed.	Telah dilaksanakan stress test secara periodik untuk konsolidasi , Regional, Subholding, dan Anak Perusahaan Periodic stress tests have been conducted for consolidation, regional, subholding, and subsidiary companies.
7	Melakukan akselerasi atau Pemumian Bisnis guna meningkatkan kinerja operasional dan finansial secara konsolidasi yang sistematis serta memaksimalkan organisasi yang lebih lincah, dengan tetap mengacu pada hasil *due diligence.* Accelerate or refine the business to improve operational and financial performance in a systematic consolidated manner and maximize a more agile organization, while still referring to the results of due diligence.	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi setiap bulannya terhadap progress pemurnian bisnis Pelindo Grup Monthly monitoring and evaluation of the progress of Pelindo Group's business refinement has been conducted.
8	Memprioritaskan percepatan penyelesaian proyek investasi yang bersifat strategis khususnya proyek yang termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai dengan target pada Tahun 2024. Prioritize the acceleration of completion of strategic investment projects, especially projects that are included in the National Strategic Projects (PSN) in accordance with the target for 2024.	Bahwa dalam rangka tercapainya progres investasi pada tahun 2024, telah dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pekerjaan-pekerjaan invetasi di lingkungan Regional dan Subholding PT Pelabuhan Indonesia khususnya proyek investasi yang bersifat strategis dan melakukan upaya percepatan proses perencanaan dan pengadaan serta berkoordinasi dengan instansi terkait untuk percepatan perizinan. To achieve investment progress by 2024, regular monitoring and evaluation of investment projects within the Regional and Subholding areas of PT Pelabuhan Indonesia, particularly strategic investment projects, has been conducted. Efforts have been made to accelerate the planning and procurement processes and coordinate with relevant agencies to expedite permitting.
9	Melakukan pengawalan secara intensif terhadap capaian realisasi penggunaan dana PMN, khususnya terkait dengan pekerjaan pengerukan alur dan kolam paket A, dengan meningkatkan koordinasi dengan para pelaksana pekerjaan sebagai upaya percepatan guna memastikan pekerjaan tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan target pada tahun 2024. Carry out intensive monitoring of the realization of the use of PMN funds, especially related to the dredging of the channel and pond of package A, by improving coordination with the work executors as an acceleration effort to ensure that the work can be completed according to the target in 2024.	Untuk pekerjaan Pengerukan Paket A telah dilakukan upaya pengendalian dengan implementasi ketentuan kontrak kritis dimana disepakati rencana percepatan untuk mengatasi keterlambatan dengan penambahan alat kerja untuk meningkatkan produktivitas pekerjaan. For the Package A dredging project, control measures have been implemented through the implementation of critical contract provisions, including an agreed-upon acceleration plan to address delays by adding work equipment to increase productivity.
10	Melakukan evaluasi atas kinerja dan menerapkan strategi pemasaran yang efektif dalam rangka memanfaatkan peluang bisnis, memperoleh pelanggan baru, serta mendorong terutama untuk proyek-proyek strategis dan Pelabuhan-pelabuhan baru. Evaluate performance and implement effective marketing strategies to take advantage of business opportunities, gain new customers, and encourage strategic projects and new ports in particular.	Telah dilakukan penjajakan kepada calon mitra strategis dalam rangka mendorong pengimplementasian proyek-proyek strategis Investigating potential strategic partners has been conducted to encourage the implementation of strategic projects.

No.	Arahan Direction	Tindak Lanjut Follow-Up
11	Menerapkan upata mitigas risiko pada setiap kegiatan khususnya pada risiko utama Perusaaan yang masih berada dalam kategori tinggi termasuk potensi risiko baru yang muncul dan *loss event* yang terjadi. Implement risk mitigation efforts in every activity, especially in the main risks. Companies that are still in the high category include the potential for new risks to arise and loss events to occur.	Telah dilakukan monitoring rencana perlakukan risiko (mitigasi risiko) yang dilakukan setiap bulan dengan membandingkan realisasi dengan target pada semua risiko utama Perusahaan Monthly monitoring of the risk treatment plan (risk mitigation) has been conducted by comparing actual performance against targets for all of the Company's key risks.
12	Mengoptimalkan publikasi atas pelaksanaan Program TJSL BUMN melalui sinergi dengan fungsi corporate communication dari perusahaan, mengupayakan penagihan secara optimal atas piutang dengan tingkat kolektibilitas macet termasuk melakukan *rescheduling* dan *erconditioning*, dan mengupayakan peningkatan level struktur organisasi yang membidangi program TJSL agar seluruh KPI Program TJSL dapat tercapai. Optimizing the publication of SOE SER Program implementation through synergy with the corporate communication function of the Company, striving for optimal collection of receivables with a level of collectability including rescheduling and reconditioning, and striving to improve the level of the organizational structure in charge of the SER program so that all SER Program KPIs can be achieved.	Perusahaan sudah memiliki Program Publikasi TJSL khusus untuk publikasi Program TJSL melalui rilis media, pembutan konten media sosial serta telah intens berkoordinasi dengan Corcom perusahaan. Telah dilakukan penandatanganan Berita Acara Komitmen Pemenuhan Pemulihan Piutang Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang meliputi pelaksanaan monitoring mitra binaan, pelaksanaan upaya Rescheduling dan Reconditioning serta memverifikasi dan validasi mitra binaan kategori bermasalah. The Company has a dedicated Corporate Social Responsibility (CSR) Publication Program for publicizing the CSR Program through media releases, creating social media content, and intensive coordination with the Company's Corcom. The Minutes of Commitment to Fulfilling Receivables Recovery for Micro and Small Business Funding Program have been signed, which includes monitoring of fostered partners, implementing rescheduling and reconditioning efforts, and verifying and validating fostered partners in the problematic category.
13	Melakukan *monitoring* secara ketat terhadap berbagai permasalahan hukum termasuk permasalahan mengenai aset dan mengambil Langkah-langkah yang tepat untuk penyelesaiannya. *Strictly monitor various legal issues including asset issues and take appropriate steps to resolve them.*	Melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulannya terhadap permasalahan hukum serta yang berkaitan dengan aset di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) *Conduct monthly monitoring and evaluation of legal issues and those related to assets within PT Pelabuhan Indonesia (Persero).*
14	Menindaklanjuti dan menyelesaikan secara tuntas terhadap setiap temuan, catatan serta saran/ rekomendasi baik dari auditor eksternal (Kantor Akuntan Publik/KAP, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/BPKP, dan Badan Pemeriksa Keuangan RI/BPK-RI termasuk instansi pengawasan berwenang lainnya) maupun auditor internal Perseroan yang belum dinyatakan seslesai ditindaklanjuti, progress tindaklanjut penyelesaian temuan-temuan dimaksud agar dibahas secara komprehensif dengan Dewan Komisaris dan disampaikan tertulis secara berkala kepada Pemegang Saham. Follow up and complete every finding, note, and suggestion/recommendation from both external auditors (Public Accounting Firm/KAP, Finance and Development Supervisory Agency/BPKP, and Indonesian Audit Board/ BPK-RI including other authorized supervisory agencies) and the Company's internal auditors that have not been declared completed, progress of follow-up on the findings is to be discussed comprehensively with Board of Commissioners and submitted in writing periodically to Shareholders.	1. Monitoring tindak lanjut audit eksternal dan internal sampai dengan Triwulan II 2024 telah mencapai 62,43% dengan rincian sebagai berikut : a. Tindak lanjut KAP Tahun 2023 : 0% dari 50 rekomendasi; b. Tindak lanjut BPK RI Tahun 2006-2024 : 80,39% atau 533 telah sesuai dari 663 rekomendasi; c. Tindak lanjut SPI Tahun 2016-2023 : 84,67% atau 2634 telah sesuai dari 3138 rekomendasi. 2. Pembahasan progres tindak lanjut internal dan eksternal dilakukan secara periodik (triwulan) dalam rapat koordinasi bersama antara SPI dengan Dewan Komisaris. Serta terhadap hal tersebut juga dilaporkan secara tertulis secara periodik yang tertuang dalam Laporan kegiatan SPI. 1. *Monitoring of external and internal audit follow-up as of the second quarter of 2024 has reached 62.43%, with the following details:* a. *Follow-up by the Public Accounting Firm (KAP) in 2023: 0% of 50 recommendations;* b. *Follow-up by the Supreme Audit Agency (BPK RI) in 2006-2024: 80.39%, or 533 out of 663 recommendations, were met;* c. *Follow-up by the Internal Audit Unit (SPI) in 2016-2023: 84.67%, or 2,634 out of 3,138 recommendations were met.* 2. *Discussions on the progress of internal and external follow-up are conducted periodically (quarterly) in joint coordination meetings between SPI and Board of Commissioners. This is also reported in writing periodically, as outlined in the SPI Activity Report.*

No.	Arahan Direction	Tindak Lanjut Follow-Up
15	Menjaga konsistensi dalam melakukan *monitoring* dan *updating* data pada Portal BUMN, yakni Portal Silaba, Portal Human Capital (HC), Portal TJSL dan Portal Publik. Progress pemutakhitan data dalam portal tersebut agar dilaporkan dalam laporan manajemen triwulanan dan laporan tahunan. Maintain consistency in monitoring and updating data on SOE Portal, namely Silaba Portal, Human Capital (HC) Portal, SER Portal and Public Portal. Progress of data updates in these portals is to be reported in quarterly management reports and annual reports.	Sudah dilakukan Updating data pada portal BUMN Data updates have been made on the SOE portal.
16	Direksi agar menindaklanjuti hal-hal yang menjadi rekomendasi dari Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Persero) sesuai surat yang disampaikan Nomor: 39/DK/PI/V-2024 tanggal 14-05-2024 perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Penyampaian Laporan Tahun 2023 (Audited) PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Board of Directors to follow up on the recommendations of Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) as stated in the letter Number: 39/DK/PI/V-2024 dated 05-14-2024 regarding Response of Board of Commissioners on Submission of 2023 Annual Report (Audited) of PT Pelabuhan Indonesia (Persero).	Sudah ditindaklanjuti oleh masing-masing group sesuai arahan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Follow-up actions have been taken by each group, as directed by the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
17	Dewan Komisaris agar meningkatkan pengawasan untuk membantu Langkah-langkah Perusahaan agar *going concern* dapat tetap terjaga dan mampu untuk survive pada setiap kondisi dan secara konsisten melakukan peningkatan pelayanan kepada pelanggan. *Board of Commissioners should increase supervision to assist the Company's actions so that the going concern can be maintained and be able to survive in every condition and consistently improve services to customers.*	

KEPUTUSAN RUPS PADA TAHUN BUKU DAN 1 (SATU) TAHUN SEBELUM TAHUN BUKU YANG DIREALISASIKAN PADA TAHUN BUKU

Seluruh keputusan RUPS Tahun 2025 telah terealisasi pada tahun 2025 dan RUPS Tahun 2024 telah terealisasi pada tahun 202Sehingga tidak terdapat keputusan RUPS Tahun 2024 dan Keputusan RUPS tahun 2025 yang belum direalisasikan pada tahun 2025.

DIREKSI

Direksi adalah Organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

TUGAS DIREKSI

Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik

RESOLUTIONS OF THE GMS IN THE FISCAL YEAR AND 1 (ONE) YEAR BEFORE THE FISCAL YEAR THAT WERE REALIZED IN THE FISCAL YEAR

All resolutions of the GMS of 2025 Fiscal Year have been realized in 2025, and resolutions of the GMS of 2024 Fiscal Year have been realized in 2024. Therefore, there are no resolutions from the 2024 GMS or 2025 GMS that have not been realized in 2025.

BOARD OF DIRECTORS

Board of Directors is a corporate organ that is authorized and responsible for managing the Company for the benefit of the Company, both inside and outside the court in accordance with the Articles of Association.

BOARD OF DIRECTORS DUTIES AND AUTHORITIES

BOARD OF DIRECTORS DUTIES

Board of Directors is in charge of carrying out all actions related to the management of the Company for the benefit of the Company in accordance with the Company's purposes and objectives, and representing the Company

di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

Setiap Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perusahaan. Direksi bertanggungj awab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perusahaan dalam mencapai maksud dan tujuannya. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada RUPS.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran. Direksi juga bertugas untuk:

1. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, risalah RUPS dan risalah rapat Direksi;
2. Membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan Perusahaan;
3. Memelihara seluruh Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan Dokumen Keuangan Perusahaan serta Dokurnen Perusahaan lainnya.

WEWENANG DIREKSI

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi berwenang untuk:

1. Menetapkan kebijakan pengurusan Perusahaan;
2. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan dan atas nama Direksi atau mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan;
3. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang Pekerja Perusahaan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan;
4. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perusahaan termasuk dalam penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi Pekerja Perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi Pekerja yang melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS;
5. Mengangkat dan memberhentikan Pekerja Perusahaan berdasarkan peraturan kepegawaian Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan; serta
7. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perusahaan, mengikat Perusahaan dengan pihak lain

both inside and outside the Court on all matters and all events with limitations as stipulated in laws and regulations, the Articles of Association and/or GMS Resolutions.

Each member of Board of Directors must carry out their duties in good faith and with full responsibility for the interests and business of the Company. Board of Directors is fully responsible for carrying out their duties for the benefit of the Company in achieving its purposes and objectives. The Board of Directors shall be accountable for the implementation of its duties to the GMS.

In performing their duties, Board of Directors must comply with the Company's Articles of Association and laws and regulations and must apply the principles of professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, responsibility and fairness. Board of Directors is also responsible to:

1. Make a Register of Shareholders, a Special Register, minutes of GMS and minutes of Board of Directors meetings;
2. Make annual reports and financial documents of the Company;
3. Maintain the entire Register of Shareholders, Special Register, Minutes of GMS, Minutes of Board of Commissioners and Board of Directors Meetings, Annual Report and Corporate Financial Documents as well as other Corporate Documents.

BOARD OF DIRECTORS AUTHORITIES

In carrying out its duties, Board of Directors is authorized to:

1. Determine the Company's management policies;
2. Regulate the Board of Directors' power of attorney to one or several members of Board of Directors to make decisions and on behalf of Board of Directors or represent the Company inside and outside the court;
3. Regulate the Board of Directors' power of attorney to one or several Company employees, either individually or jointly or to other people, to represent the Company inside and outside the Court;
4. Regulate the provisions regarding the Company's employment including in the determination of salary, pension or old age benefits and other income for employees based on applicable laws and regulations, with provisions for determining salary, pension or old age benefits and other income for Employees that exceed obligations stipulated by laws and regulations, must obtain prior approval from the GMS;
5. Appoint and dismiss Company Employees based on the Company's employment regulations and applicable laws and regulations;
6. Appoint and dismiss the Corporate Secretary; and
7. Perform all actions and other actions regarding the management and ownership of the Company's assets, bind the Company with other parties and/or other

dan/atau pihak lain dengan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan /atau Keputusan RUPS.

TANGGUNG JAWAB DIREKSI

1. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi bertanggung jawab kepada RUPS;
2. Dalam hal Perusahaan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, Direksi harus segera melaporkan kepada Pemegang Saham dengan tembusan Dewan Komisaris, dengan disertai usu lan mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;
3. Memberikan pendapat dan saran kepada Pemegang Saham melalui RUPS setiap permasalahan yang dianggap penting bagi pengelolaan Perusahaan.

TUGAS DAN WEWENANG MASING-MASING DIREKSI

Tugas pokok dan wewenang masing-masing Direksi telah diatur dalam Peraturan Direksi Nomor HK.01/24/7/1/PSOG/UTMA/PLND-23 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Adapun rincian tugas pokok dan wewenang masing-masing Direksi adalah sebagai berikut.

Direktur Utama

Tugas pokok Direktur Utama adalah menyelenggarakan pengurusan Perusahaan dengan memimpin Perusahaan, serta mengendalikan langsung sebagian tugas pengurusan Perusahaan di bidang Sekretariat Perusahaan, Satuan Pengawasan Intern, serta Transformasi Korporasi dan Manajemen Program.

Direktur Utama dalam melaksanakan tugasnya, berwenang menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Bertindak sebagai pimpinan dari para anggota Direksi untuk menyusun Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan melaksanakan kegiatan usaha Perusahaan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Kerja Manajemen (RKM);
2. Mengarahkan dan mengendalikan implementasi kebijakan, visi, misi, dan strategi Perusahaan yang telah ditetapkan dalam RJPP;
3. Mengarahkan dan mengendalikan seluruh kegiatan Perusahaan termasuk namun tidak terbatas pada perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi atas pencapaian RJPP, RKAP, RKM, kegiatan-kegiatan dalam rangka peningkatan budaya korporasi, citra positif Perusahaan, dan tata kelola Perusahaan (*good corporate governance*) dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Perusahaan sesuai dengan visi misi Perusahaan;

parties with the Company, and represent the Company in and out of court on all matters and all events, with restrictions as stipulated in laws and regulations, Articles of Association and/or GMS Resolutions.

BOARD OF DIRECTORS RESPONSIBILITIES

1. In carrying out their duties, Board of Directors is responsible to the GMS;
2. In the event that the Company shows signs of significant decline, Board of Directors must immediately report to the Shareholders with a copy to the Board of Commissioners, accompanied by suggestions regarding corrective measures to be taken;
3. Provide opinions and suggestions to Shareholders through the GMS on any issues deemed important for the management of the Company.

DUTIES AND AUTHORITIES OF EACH DIRECTOR

The main duties and authorities of each Director are regulated in the Board of Directors Regulation No. HK.01/24/7/1/PSOG/UTMA/PLND-23 concerning the Organisation and Governance Structure of PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Details of the main duties and authorities of each Director are as follows:

President Director

The President Director's main duty is to carry out the management of the Company by leading the Company, as well as directly controlling part of the Company's management duties in Corporate Secretariat, Internal Audit Unit, as well as Corporate Transformation and Program Management.

In performing his/her duties, President Director is authorised to perform the following functions:

1. Act as the leader of members of Board of Directors to prepare the Company's Long Term Plan (RJPP) and implement the Company's business activities that have been determined in the Company's Work Plan and Budget (RKAP) and Management Work Plan (RKM);
2. Directing and controlling the implementation of the Company's policies, vision, mission, and strategies set out in the RJPP;
3. Directing and controlling all activities of the Company including but not limited to planning, implementing, controlling, evaluating the achievement of RJPP, RKAP, RKM, activities in order to improve corporate culture, positive image of the Company, and good corporate governance in order to achieve the Company's goals and objectives in accordance with the Company's vision and mission;

4. Memimpin dan mengoordinasikan penyusunan strategi sebagai penjabaran atas RJPP, RKAP, RKM dalam kegiatan Sekretariat Perusahaan, Satuan Pengawasan Intern, serta Transformasi Korporasi dan Manajemen Program;
5. Menandatangani seluruh Peraturan/Keputusan Direksi yang diputuskan di dalam rapat Direksi maupun di luar rapat Direksi yang dilaksanakan sesuai ketentuan dalam anggaran dasar Perusahaan, kecuali atas kewenangan yang telah didelegasikan berdasarkan kebijakan dan Standar Prosedur Operasi (SPO) terkait;
6. Menandatangani perjanjian, kontrak atau perikatan lainnya dengan pihak ketiga terkait dengan pengurusan Perusahaan sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam anggaran dasar Perusahaan;
7. Memimpin Rapat Direksi dan rapat korporasi lainnya serta mengoordinasikan Direksi untuk pelaksanaan rapat Dewan Komisaris/Rapat Umum Pemegang Saham;
8. Memberikan informasi terkait segala sesuatu tentang Perusahaan kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*);
9. Bertindak sebagai pembina atau pengarah proses Integrasi Paska Penggabungan Perusahaan;
10. Memimpin dan menetapkan strategi sebagai penjabaran atas RJPP, RKAP, RKM dalam kegiatan Sekretariat Perusahaan, Satuan Pengawasan Intern, serta Transformasi Korporasi dan Manajemen Program;
11. Menetapkan, mengarahkan dan mengawasi/ mengevaluasi strategi dan pelaksanaan kegiatan Sekretariat Perusahaan (*corporate secretary*);
12. Menetapkan, mengarahkan, dan mengawasi/ mengevaluasi strategi dan pelaksanaan kegiatan pengawasan intern (internal audit) berupa audit operasional dan audit/reviu dengan tujuan tertentu dilakukan secara efektif, serta memantau tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit/reviu untuk membantu Direksi menilai efektivitas penyelenggaraan pengawasan internal, manajemen risiko dan tata kelola Perusahaan yang baik dalam rangka mencapai tujuan Perusahaan;
13. Menetapkan, mengarahkan dan mengawasi/ mengevaluasi strategi dan pelaksanaan kegiatan transformasi korporasi dan manajemen program;
14. Mengoordinasikan dan mengevaluasi kegiatan penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan dan Standar Prosedur Operasi (SPO) terkait kegiatan Sekretariat Perusahaan, Pengawasan Intern serta Transformasi Korporasi dan Manajemen Program;
15. Memastikan pelaksanaan pembinaan Pekerja di seluruh korporasi sesuai kebijakan/pedoman di bidang Sumber Daya Manusia.

4. Leading and coordinating the preparation of strategies as an elaboration of RJPP, RKAP, RKM in the activities of Corporate Secretariat, Internal Audit Unit, as well as Corporate Transformation and Program Management;
5. Signing all Regulations/Decisions of Board of Directors decided in the Board of Directors meeting or outside the Board of Directors meeting carried out in accordance with the provisions in the articles of association of the Company, except for the authority that has been delegated based on related policies and Standard Operating Procedures (SPO);
6. Sign agreements, contracts or other engagements with third parties related to the management of the Company in accordance with the authority stipulated in the Company's articles of association;
7. Preside over the Board of Directors Meeting and other corporate meetings and coordinate the Board of Directors for the implementation of Board of Commissioners/General Meeting of Shareholders meetings;
8. Provide information related to everything about the Company to stakeholders;
9. Acting as a supervisor or director of the Post-Merger Integration process of the Company;
10. Leading and setting strategies as an elaboration of RJPP, RKAP, RKM in the activities of Corporate Secretariat, Internal Audit Unit, as well as Corporate Transformation and Program Management;
11. Establish, direct and supervise/evaluate the strategy and implementation of the Corporate Secretariat activities;
12. Establishing, directing, and supervising/evaluating the strategy and implementation of internal audit activities in the form of operational audits and audits/reviews with specific objectives carried out effectively, as well as monitoring follow-up on recommendations from audits/reviews to help the Board of Directors assess the effectiveness of internal control, risk management and good corporate governance in order to achieve the Company's objectives;
13. Establish, direct and supervise/evaluate the strategy and implementation of corporate transformation activities and programme management;
14. Coordinating and evaluating the preparation and implementation of Policies and Standard Operating Procedures (SPO) related to the activities of Corporate Secretariat, Internal Audit and Corporate Transformation and Program Management;
15. Ensuring the implementation of Employee development throughout the corporation in accordance with policies/ guidelines in the field of Human Capital.

Wakil Direktur Utama

Tugas pokok Wakil Direktur Utama adalah menyelenggarakan sebagian tugas pengurusan Perusahaan di bidang Hukum, Manajemen Portofolio Anak Perusahaan dan Manajemen Risiko, Tata Kelola dan Kepatuhan serta membantu Direktur Utama dalam memimpin Perusahaan.

Wakil Direktur Utama berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas-tugas Direktur Utama apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan pada pihak ketiga. Wakil Direktur Utama berwenang memimpin rapat Direksi apabila Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan.

Wakil Direktur Utama dalam melaksanakan tugasnya, berwenang menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Memimpin dan menetapkan strategi sebagai penjabaran atas RJPP, RKAP, dan RKM dalam kegiatan hukum, manajemen portofolio anak perusahaan dan manajemen risiko, tata kelola dan kepatuhan serta mengawasi/mengevaluasi strategi yang telah ditetapkan;
2. Menetapkan, mengarahkan serta mengawasi/mengevaluasi strategi, pelaksanaan kegiatan hukum, manajemen portofolio Anak Perusahaan, dan manajemen risiko, tata kelola dan kepatuhan;
3. Mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi kinerja Anak Perusahaan, dan Subholding dalam mengimplementasikan RJPP dan RKAP, baik secara triwulan, semester dan tahunan atau sewaktu-waktu (jika dianggap perlu), serta bertanggung jawab untuk mengoordinasikan pelaksanaan RUPS Anak Perusahaan, Subholding Perusahaan Afiliasi, dan Perusahaan Terafiliasi baik luar biasa atau tahunan.
4. Menjalankan tugas monitoring kinerja pada Perusahaan, Anak Perusahaan, Subholding Perusahaan Afiliasi, dan Perusahaan Terafiliasi;
5. Mengoordinasikan, mengendalikan serta mengevaluasi kegiatan dukungan dalam aspek hukum, baik berupa pemberian pendapat hukum, reviu penyusunan dokumen hukum dan reviu penyusunan peraturan internal Perusahaan, pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan internal Perusahaan, pendampingan dan penanganan permasalahan hukum dalam rangka pelaksanaan kegiatan Perusahaan;
6. Memastikan pelaksanaan pembinaan Pekerja di bawah pimpinan Wakil Direktur Utama sesuai kebijakan/pedoman di bidang Sumber Daya Manusia;
7. Merupakan Koordinator Internal yang bertindak sebagai penanggung jawab koordinasi antar Direktorat dalam rangka pengelolaan ketercapaian performansi seluruh Direktorat secara kolektif serta bertanggung jawab atas pelaporan kinerja seluruh Direktorat kepada Direktur Utama;

Vice President Director

The Vice President Director's main duty is to carry out part of the Company's management duties in the fields of Law, Subsidiary Portfolio Management and Risk Management, Governance and Compliance and to assist the President Director in leading the Company.

Vice President Director is authorised to act for and on behalf of Board of Directors and to perform the President Director's duties in the absence or inability of President Director for any reason whatsoever, which need not be proven to a third party. Vice President Director is authorised to chair the Board of Directors meeting if the President Director is not present or absent.

In performing his/her duties, Vice President Director is authorised to perform the following functions:

1. Leading and setting strategies as an elaboration of RJPP, RKAP, and RKM in legal activities, subsidiary portfolio management and risk management, governance and compliance as well as overseeing/evaluating the strategies that have been set;
2. Establish, direct and supervise/evaluate strategies, implementation of legal activities, portfolio management of subsidiaries, and risk management, governance and compliance;
3. Coordinating, controlling and evaluating the performance of Subsidiaries, and Subholding in implementing the RJPP and RKAP, either on a quarterly, semester and annual basis or at any time (if deemed necessary), as well as being responsible for coordinating the GMS of Subsidiaries, Subholding Affiliated Companies, and Affiliated Companies either extraordinary or annual.
4. Perform performance monitoring duties on the Company, Subsidiaries, Affiliated Subholding Companies, and Affiliated Companies;
5. Coordinating, controlling and evaluating support activities in legal aspects, both in the form of providing legal opinions, reviewing the preparation of legal documents and reviewing the preparation of the Company's internal regulations, checking compliance with the Company's internal regulations, assistance and handling legal issues in the context of implementing the Company's activities;
6. Ensure the implementation of Employee development under the Vice President Director's leadership in accordance with policies/guidelines in the field of Human Capital;
7. Act as Internal Coordinator in charge of coordination between Directorates in order to manage the performance achievement of all Directorates collectively and is responsible for reporting the performance of all Directorates to the President Director;

8. Mengoordinasikan dan mengendalikan implementasi kebijakan, visi, misi, dan strategi Perusahaan yang telah ditetapkan dalam RJPP, serta seluruh kegiatan Perusahaan;
9. Melaporkan kinerja seluruh Direktorat secara kolektif kepada Direktur Utama serta memberikan konsultansi kepada Direktur Utama dalam pengambilan keputusan;
10. Bertindak sebagai pengawas proses Integrasi Paska Penggabungan Perusahaan;
11. Menandatangani perjanjian, kontrak atau perikatan lainnya dengan pihak ketiga terkait dengan pengurusan Perusahaan berdasarkan kuasa dari Direktur Utama atas nama Direksi untuk hal-hal tertentu;
12. Menandatangani perjanjian, kontrak atau perikatan lainnya dengan pihak ketiga terkait dengan pengurusan Perusahaan, khususnya dalam bidang- bidang di bawah Wakil Direktur Utama atau berdasarkan kewenangan yang telah didelegasikan dalam kebijakan dan SPO terkait.

Direktur Keuangan

Tugas pokok Direktur Keuangan adalah menyelenggarakan tugas pengurusan Perusahaan di bidang Akuntansi, Pengelolaan Keuangan, Perencanaan dan Performa Keuangan, Layanan Keuangan dan Perpajakan. Direktur Keuangan dalam melaksanakan tugasnya berwenang menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Memimpin dan menetapkan strategi sebagai penjabaran atas RJPP, RKAP, dan RKM dalam Perusahaan di bidang akuntansi, perbendaharaan, keuangan dan investasi;
2. Bertanggung jawab dalam penyusunan, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pencapaian RKAP berdasarkan kebutuhan dan rencana strategis Perusahaan;
3. Mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pencatatan transaksi keuangan dan penyusunan laporan triwulan, semester, dan tahunan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku secara tepat waktu;
4. Melaksanakan pemenuhan aspek perpajakan terkait dengan kegiatan Perusahaan;
5. Mengoordinasikan, mengendalikan serta mengevaluasi kegiatan optimalisasi dana Perusahaan secara akuntabel dan memperhatikan prinsip kehati-hatian melalui kegiatan penempatan dana pada bank dan/ atau instrumen pasar uang lainnya termasuk kegiatan pengadministrasian untuk menjamin ketersediaan dana guna membiayai kegiatan operasional Perusahaan;
6. Mengoordinasikan, mengendalikan serta mengevaluasi kegiatan atau upaya-upaya untuk mendapatkan pembiayaan dari pihak ketiga guna membiayai kegiatan Perusahaan sehingga dapat bertumbuh dan mencapai tujuan/ strategi yang ditetapkan;
7. Mengoordinasikan, mengendalikan serta mengevaluasi penggunaan anggaran Perusahaan serta melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pembayaran dan penagihan ke pihak lain terkait kegiatan Perusahaan;
8. Coordinating and controlling the implementation of the Company's policies, vision, mission, and strategies set out in the RJPP, as well as all the Company's activities;
9. Reporting the performance of all Directorates collectively to the President Director and providing consultancy to the President Director in decision making;
10. Act as the supervisor of post-merger integration process;
11. Sign agreements, contracts or other engagements with third parties related to the management of the Company based on authorisation from President Director on behalf of Board of Directors for certain matters;
12. Sign agreements, contracts or other engagements with third parties related to the management of the Company, particularly in areas under Vice President Director or based on the authority that has been delegated in the relevant policies and SPO.

Finance Director

The Finance Director's main duty is to organise the management of the Company in the field of Accounting, Financial Management, Financial Planning and Performance, Financial Services and Taxation. Finance Director in carrying out his duties is authorised to carry out the following functions:

1. Leading and setting strategies as an elaboration of RJPP, RKAP, and RKM in the Company in the fields of accounting, treasury, finance and investment;
2. Responsible for preparing, coordinating, controlling and evaluating the achievement of RKAP based on the needs and strategic plans of the Company;
3. Coordinating, controlling and evaluating the activities of recording financial transactions and preparing quarterly, semester, and annual reports in accordance with applicable accounting standards in a timely manner;
4. Carrying out the fulfilment of taxation aspects related to the Company's activities;
5. Coordinating, controlling and evaluating the activities of optimising the Company's funds in an accountable manner and taking into account the principles of prudence through the placement of funds in banks and/or other money market instruments including administration activities to ensure the availability of funds to finance the Company's operational activities;
6. Coordinating, controlling and evaluating activities or efforts to obtain financing from third parties to finance the Company's activities so that it can grow and achieve the objectives/strategies set;
7. Coordinating, controlling and evaluating the use of the Company's budget as well as implementing and controlling payment and collection activities to other parties related to the Company's activities;

8. Mengoordinasikan, mengendalikan serta mengevaluasi pengembangan di bidang akuntansi, perbendaharaan dan keuangan sesuai dengan RKAP, RJPP dan/atau rencana bisnis Perusahaan;
9. Mengoordinasikan pelaksanaan, mengevaluasi dan menyetujui kegiatan pencatatan, administrasi, dan dokumentasi serta penyusunan laporan pengurusan Perusahaan terkait dengan bidang akuntansi;
10. Mengoordinasikan serta mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan Standar Prosedur Operasi (SPO) terkait kegiatan keuangan;
11. Menandatangani perjanjian, kontrak atau perikatan lainnya dengan pihak ketiga terkait dengan pengurusan Perusahaan, khususnya dalam bidang tugas keuangan atau berdasarkan kewenangan yang telah didelegasikan dalam kebijakan dan SPO terkait;
12. Menandatangani perjanjian, kontrak atau perikatan lainnya dengan pihak ketiga terkait dengan pengurusan Perusahaan berdasarkan kuasa dari Direktur Utama atas nama Direksi untuk hal-hal tertentu;
13. Memastikan pelaksanaan pembinaan Pekerja di bawah pimpinan Direktur Keuangan sesuai kebijakan/pedoman di bidang Sumber Daya Manusia;
14. Mengoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan dan kegiatan-kegiatan di bidang Keuangan yang dijalankan baik di Perusahaan, Anak Perusahaan, Subholding, Perusahaan Afiliasi, dan Perusahaan Terafiliasi.

Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum

Tugas pokok Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum adalah menyelenggarakan sebagian tugas pengurusan Perusahaan di bidang Strategi SDM, Pengelolaan SDM, Layanan SDM, serta Pengadaan. Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum dalam melaksanakan tugasnya, berwenang menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Memimpin dan menetapkan strategi sebagai penjabaran atas RJPP, RKAP, dan RKM dalam Perusahaan di bidang Strategi SDM, Pengelolaan SDM, Layanan SDM serta Pengadaan;
2. Mengoordinasikan, mengendalikan serta mengevaluasi penyusunan Human Capital *Roadmap*;
3. Mengoordinasikan, mengendalikan serta mengevaluasi desain dan penyelarasan struktur organisasi serta perencanaan SDM;
4. Mengoordinasikan, mengendalikan serta mengevaluasi kebijakan Sumber Daya Manusia bidang pengelolaan SDM Anak Perusahaan agar sejalan dengan tujuan Perusahaan;
5. Mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi penyusunan strategi kebijakan serta implementasi *secondment agreement* antar Induk dan Anak Perusahaan;
6. Mengoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi pengelolaan pelayanan bidang SDM yang terdiri dari pelayanan Pekerja, payroll dan Administrasi serta pengelola alih daya;

8. Coordinating, controlling and evaluating the development in accounting, treasury and finance in accordance with the RKAP, RJPP and/or the Company's business plan;
9. Coordinating the implementation, evaluating and approving the recording, administration, and documentation activities as well as the preparation of the Company's management reports related to the accounting sector;
10. Coordinating and evaluating the preparation and implementation of policies and Standard Operating Procedures (SPO) related to financial activities;
11. Sign agreements, contracts or other engagements with third parties related to the management of the Company, especially in the field of financial duties or based on the authority that has been delegated in the relevant policies and SPO;
12. Sign agreements, contracts or other engagements with third parties related to the management of the Company based on authorisation from President Director on behalf of Board of Directors for certain matters;
13. Ensuring the implementation of Employee development under the Finance Director's leadership in accordance with policies/guidelines in the field of Human Capital;
14. Coordinating, controlling, and evaluating policies and activities in the field of Finance carried out both in the Company, Subsidiaries, Subholding, Affiliated Companies, and Affiliated Companies.

Human Capital and General Affairs Director

The Human Capital and General Affairs Director's main duty is to carry out part of the Company's management duties in the field of HC Strategy, HC Management, HC Services, and Procurement. In carrying out his duties, Human Capital and General Affairs Director is authorised to carry out the following functions:

1. Leading and determining strategies as an elaboration of RJPP, RKAP, and RKM in the Company in the fields of HC Strategy, HC Management, HC Services and Procurement;
2. Coordinating, controlling and evaluating the preparation of Human Capital Roadmap
3. Coordinating, controlling and evaluating the design and alignment of organisational structure and HC planning;
4. Coordinating, controlling and evaluating Human Capital policies in the field of HC management of Subsidiaries to be in line with the Company's objectives;
5. Coordinating, controlling and evaluating the preparation of policy strategies and implementation of secondment agreements between the Parent and Subsidiaries;
6. Coordinating, controlling and evaluating the management of HC services consisting of Worker services, payroll and Administration and outsourcing management;

7. Mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi integrasi Human Capital System terdiri dari reviu dan penyelarasan kebijakan SDM serta pengembangan sistem informasi human capital,
8. Mengoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi penyusunan desain remunerasi, harmonisasi remunerasi, desain strategi program exit plan serta desain *reward* dan *punishment*,
9. Mengoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi pengembangan karir Pekerja;
10. Mengoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi pengelolaan kegiatan bidang hubungan Pekerja termasuk *survey* kepuasan dan keterikatan Pekerja;
11. Mengoordinasikan, mengendalikan serta mengevaluasi kegiatan pengembangan kebijakan Sumber Daya Manusia yang meliputi perencanaan strategi Sumber Daya Manusia, Pengelolaan SDM, dan Layanan SDM dalam rangka meningkatkan kompetensi dan produktivitas sumber daya yang selaras dengan Rencana Jangka Pendek dan Jangka Panjang Perusahaan;
12. Mengoordinasikan, mengendalikan serta mengevaluasi kegiatan rekrutmen, pengembangan Sumber Daya Manusia;
13. Mengoordinasikan, mengendalikan serta mengevaluasi kebijakan dan pengelolaan kinerja individu;
14. Mengoordinasikan, mengendalikan serta mengevaluasi program bagi SDM yang telah mencapai masa pensiun termasuk program persiapan pensiun;
15. Mengoordinasikan, mengendalikan serta mengevaluasi kegiatan pemenuhan sarana/prasarana kerja dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan Perusahaan termasuk memelihara dan mengadministrasikan aset-aset Perusahaan yang dipergunakan untuk operasional rutin Perusahaan secara akuntabel;
16. Mengoordinasikan, mengendalikan serta mengevaluasi kegiatan pengarsipan atas dokumen-dokumen Perusahaan;
17. Mengoordinasikan, mengendalikan serta mengevaluasi kegiatan Sumber Daya Manusia dalam rangka memberikan dukungan yang optimal pada kegiatan Perusahaan;
18. Mengoordinasikan serta mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan dan Standar Prosedur Operasi (SPO) terkait kegiatan strategi Sumber Daya Manusia, pembelajaran, layanan SDM serta pengadaan;
19. Memberikan persetujuan atau keputusan atas pelaksanaan kegiatan di bidang strategi Sumber Daya Manusia, pengelolaan SDM, layanan SDM, serta pengadaan sesuai pendelegasian kewenangan dari Direksi;
20. Mengoordinasikan, mengendalikan serta mengevaluasi kegiatan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
21. Menandatangani perjanjian, kontrak atau perikatan lainnya dengan pihak ketiga terkait dengan pengurusan Perusahaan, khususnya dalam bidang-bidang di bawah Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum atau berdasarkan kewenangan yang telah didelegasikan dalam kebijakan dan SPO terkait;

7. Coordinating, controlling and evaluating the integration of Human Capital System consisting of reviewing and aligning HC policies and developing human capital information systems,
8. Coordinating, controlling and evaluating the preparation of remuneration design, remuneration harmonisation, exit plan strategy design and reward and punishment design,
9. Coordinating, controlling, and evaluating Employee career development;
10. Coordinating, controlling, and evaluating the management of Employee relations activities including Employee satisfaction and engagement surveys;
11. Coordinating, controlling and evaluating Human Capital policy development activities which include Human Capital strategy planning, Human Capital Management, and Human Capital Services in order to improve the competence and productivity of resources in line with the Company's Short Term and Long Term Plans;
12. Coordinating, controlling and evaluating recruitment activities, Human Capital development;
13. Coordinating, controlling and evaluating policies and individual performance management;
14. Coordinating, controlling and evaluating programmes for HC who have reached retirement age including retirement preparation programmes;
15. Coordinating, controlling and evaluating activities to fulfil work facilities/infrastructure in order to support the Company's activities, including maintaining and administering the Company's assets used for the Company's routine operations in an accountable manner;
16. Coordinating, controlling and evaluating archiving activities for Company documents;
17. Coordinating, controlling and evaluating Human Capital activities in order to provide optimal support to the Company's activities;
18. Coordinate and evaluate the preparation and implementation of Policies and Standard Operating Procedures (SPO) related to Human Capital strategy activities, learning, HC services and procurement;
19. Provide approval or decision on activities implementation in Human Capital strategy, HC management, HC services, and procurement in accordance with the delegation of authority from the Board of Directors;
20. Coordinating, controlling and evaluating the procurement of goods and services in accordance with applicable regulations;
21. Sign agreements, contracts or other engagements with third parties related to the management of the Company, particularly in the areas under the Human Capital and General Affairs Director or based on the authority that has been delegated in the relevant policies and SPO;

22. Menandatangani perjanjian, kontrak atau perikatan lainnya dengan pihak ketiga terkait dengan pengurusan Perusahaan berdasarkan kuasa dari Direktur Utama atas nama Direksi untuk hal-hal tertentu;

23. Memastikan pelaksanaan pembinaan Pekerja di bawah pimpinan Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum sesuai kebijakan/pedoman di bidang Sumber Daya Manusia.

Direktur Strategi

Tugas pokok Direktur Strategi adalah menyelenggarakan sebagian tugas pengurusan Perusahaan dibidang Strategi Korporasi dan Inovasi, Pengembangan Bisnis dan Aliansi Strategis, Teknologi Informasi dan Manajemen Investasi. Direktur Strategis dalam melaksanakan tugasnya, berwenang menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Memimpin dan menetapkan strategi sebagai penjabaran atas RJPP, RKAP, dan RKM dalam kegiatan perencanaan strategis, pengembangan bisnis dan aliansi strategis, teknologi informasi dan manajemen investasi, serta mengawasi/mengevaluasi strategi yang telah ditetapkan;
2. Menetapkan, mengarahkan dan mengawasi/mengevaluasi strategi dan pelaksanaan kegiatan strategi korporasi dan inovasi, pengembangan bisnis dan aliansi strategis, teknologi informasi dan manajemen investasi;
3. Bertanggung jawab atas penetapan visi, misi, dan nilai Perusahaan;
4. Bertanggung jawab atas penetapan strategi Perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Perusahaan sesuai dengan visi misi Perusahaan;
5. Mengarahkan dan mengendalikan implementasi kebijakan, visi, misi, dan strategi Perusahaan yang telah ditetapkan dalam RJPP;
6. Bertanggung jawab atas penetapan strategi pengembangan bisnis Perusahaan guna memberikan dukungan yang optimal pada kegiatan Perusahaan;
7. Menandatangani perjanjian, kontrak atau perikatan lainnya dengan pihak ketiga terkait dengan pengurusan Perusahaan, khususnya dalam bidang-bidang di bawah Direktur Strategi atau berdasarkan kewenangan yang telah didelegasikan dalam kebijakan dan SPO terkait,
8. Menandatangani perjanjian, kontrak atau perikatan lainnya dengan pihak ketiga terkait dengan pengurusan Perusahaan berdasarkan kuasa dari Direktur Utama atas nama Direksi untuk hal-hal tertentu;
9. Memastikan pelaksanaan pembinaan Pekerja di bawah pimpinan Direktur Strategi sesuai kebijakan/pedoman di bidang Sumber Daya Manusia.

22. Sign agreements, contracts or other engagements with third parties related to the management of the Company based on authorisation from President Director on behalf of Board of Directors for certain matters;
23. Ensuring the implementation of Employee development under the Human Capital and General Affairs Director in accordance with policies/guidelines in the field of Human Capital.

Strategy Director

The Strategy Director's main duty is to carry out part of the Company's management duties in the field of Corporate Strategy and Innovation, Business Development and Strategic Alliances, Information Technology and Investment Management. In carrying out his/her duties, Strategy Director is authorised to carry out the following functions:

1. Leading and setting strategies as an elaboration of RJPP, RKAP, and RKM in strategic planning activities, business development and strategic alliances, information technology and investment management, as well as overseeing/evaluating the strategies that have been set;
2. Determining, directing and supervising/evaluating the strategy and implementation of corporate strategy and innovation activities, business development and strategic alliances, information technology and investment management;
3. Responsible for establishment of the Company's vision, mission and values;
4. Responsible for establishment of the Company's strategy in order to achieve the Company's goals and objectives in accordance with the Company's vision and mission;
5. Directing and controlling the implementation of the Company's policies, vision, mission, and strategies that have been set out in the RJPP;
6. Responsible for determining the Company's business development strategy in order to provide optimal support to the Company's activities;
7. Sign agreements, contracts or other engagements with third parties related to the management of the Company, particularly in areas under the Strategy Director or based on the authority that has been delegated in the relevant policies and SPO,
8. Sign agreements, contracts or other engagements with third parties related to the management of the Company based on authorisation from President Director on behalf of Board of Directors for certain matters;
9. Ensuring the implementation of Employee development under the Strategy Director's leadership in accordance with policies/guidelines in the field of Human Capital.

Direktur Investasi

Tugas pokok Direktur Investasi adalah menyelenggarakan sebagian tugas pengurusan Perusahaan di bidang fasilitas pelabuhan, peralatan pelabuhan, manajemen proyek dan manajemen aset. Direktur Investasi dalam melaksanakan tugasnya, berwenang menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Memimpin dan menetapkan strategi sebagai penjabaran atas RJPP, RKAP, dan RKM dalam kegiatan pembangunan infrastruktur, suprastruktur, pemeliharaan fasilitas dan peralatan pelabuhan, manajemen proyek serta manajemen aset;
2. Melakukan kajian investasi serta menetapkan prioritisasi investasi baik fasilitas maupun peralatan pelabuhan sebagai usulan kepada komite investasi untuk dituangkan ke dalam RKAP;
3. Mengoordinasikan, mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur, suprastruktur dan alat apung pelabuhan, pengembangan serta pemeliharaan fasilitas pelabuhan, manajemen proyek;
4. Memberikan persetujuan atau keputusan bisnis di bidang teknik sesuai pendelegasian kewenangan dari Direksi;
5. Mengoordinasikan serta mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan dan Standar Prosedur Operasi (SPO) terkait kegiatan investasi;
6. Menandatangani perjanjian, kontrak atau perikatan lainnya dengan pihak ketiga terkait dengan pengurusan Perusahaan, khususnya dalam bidang tugas teknik atau berdasarkan kewenangan yang telah didelegasikan dalam kebijakan dan SPO terkait;
7. Menandatangani perjanjian, kontrak atau perikatan lainnya dengan pihak ketiga terkait dengan pengurusan Perusahaan berdasarkan kuasa dari Direktur Utama atas nama Direksi untuk hal-hal tertentu;
8. Mengoordinasikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan dan kegiatan-kegiatan di bidang- bidang di bawah Direktur Investasi yang dijalankan baik di Perusahaan, Anak Perusahaan, Subholding, Perusahaan Afiliasi, dan Perusahaan Terafiliasi;
9. Memimpin dan menetapkan strategi *sustainable development* dan *Green Port* dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Perusahaan sesuai dengan visi misi Perusahaan;
10. Mengoordinasikan, mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah, portofolio aset serta penyelesaian aset bermasalah yang belum dikomersialisasi;
11. Memastikan pelaksanaan pembinaan Pekerja di bawah pimpinan Direkstur Investasi sesuai kebijakan/ pedoman di bidang Sumber Daya Manusia.

Investment Director

The Investment Director's main duty is to carry out part of the Company's management duties in the field of port facilities, port equipment, project management and asset management. In carrying out his duties, Investment Director is authorised to carry out the following functions:

1. Leading and setting strategies as an elaboration of RJPP, RKAP, and RKM in infrastructure development activities, superstructure, maintenance of port facilities and equipment, project management and asset management;
2. Conduct investment studies and determine investment prioritisation in both port facilities and equipment as a proposal to the investment committee to be included in the RKAP;
3. Coordinating, controlling and evaluating the implementation of infrastructure development activities, superstructure and port floating equipment, development and maintenance of port facilities, project management;
4. Providing approval or business decisions in the field of engineering in accordance with delegation of authority from the Board of Directors;
5. Coordinating and evaluating the preparation and implementation of Policies and Standard Operating Procedures (SPO) related to investment activities;
6. Sign agreements, contracts or other engagements with third parties related to the management of the Company, particularly in the field of engineering duties or based on the authority that has been delegated in the relevant policies and SPO;
7. Sign agreements, contracts or other engagements with third parties related to the management of the Company based on authorisation from President Director on behalf of Board of Directors for certain matters;
8. Coordinating and evaluating policies and activities in the fields under the Investment Director that are carried out both in the Company, Subsidiaries, Subholding, Affiliated Companies, and Affiliated Companies;
9. Leading and establishing sustainable development and Green Port strategies in order to achieve the Company's goals and objectives in accordance with the Company's vision and mission;
10. Coordinating, controlling and evaluating the implementation of land acquisition activities, asset portfolios and settlement of problematic assets that have not been commercialised;
11. Ensuring the implementation of Employee development under the Investment Director's leadership in accordance with policies/guidelines in the field of Human Capital.

Direktur Pengelola

Tugas pokok Direktur Pengelola adalah menyelenggarakan tugas pengurusan Perusahaan di bidang Pelayanan Terminal, Pelayanan Kapal, Pelayanan Pelanggan, serta K3 dan Sistem Manajemen. Direktur Pengelola dalam melaksanakan tugasnya, berwenang menyelenggarakan fungsi fungsi sebagai berikut:

1. Memimpin dan menetapkan strategi sebagai penjabaran atas RJPP, RKAP dan RKM dalam Perusahaan di bidang pelayanan terminal, pelayanan kapal, Pelayanan Pelanggan serta Sistem K3 dan Manajemen Mutu yang telah ditetapkan, serta potensi pendapatan lainnya dengan tujuan untuk mengoptimalkan pendapatan bagi Perusahaan;
2. Mengoordinasikan, mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan kapal, pelayanan terminal, pelayanan pelanggan serta K3 dan Sistem Manajemen dari strategi yang telah ditetapkan;
3. Mengoordinasikan, mengendalikan serta mengevaluasi kegiatan untuk pemenuhan optimalisasi pelayanan jasa kepelabuhanan, pelayanan pelanggan baik dalam rangka implementasi strategi Perusahaan, melaksanakan tugas dari Pemerintah maupun dari stakeholders,
4. Mengoordinasikan, mengendalikan serta mengevaluasi implementasi kegiatan strategi kegiatan pemberian jasa pelabuhan antara lain dalam rangka kegiatan pengelolaan layanan pandu dan tunda, pengelolaan bongkar muat barang, pengelolaan terminal penumpang, dan manajemen sistem informasi yang terintegrasi dengan *stakeholders*,
5. Mengoordinasikan pelaksanaan, mengevaluasi dan menyetujui kegiatan pencatatan,
6. administrasi dan dokumentasi serta penyusunan laporan pengurusan Perusahaan terkait dengan bidang pengelola secara baik, akurat, aman, dan tepat waktu baik untuk keperluan internal maupun eksternal Perusahaan;
7. Memberikan persetujuan atau keputusan bisnis di bidang pengelola sesuai pendelegasian kewenangan dari Direksi;
8. Mengoordinasikan serta mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan Standar Prosedur Operasi (SPO) terkait kegiatan pengelola;
9. Menandatangani perjanjian, kontrak atau perikatan lainnya dengan pihak ketiga terkait dengan pengurusan Perusahaan, khususnya dalam bidang tugas pengelola atau berdasarkan kewenangan yang telah didelegasikan dalam kebijakan dan SPO terkait;
10. Menandatangani perjanjian, kontrak atau perikatan lainnya dengan pihak ketiga terkait dengan pengurusan Perusahaan berdasarkan kuasa dari Direktur Utama atas nama Direksi untuk hal-hal tertentu;
11. Memastikan pelaksanaan pembinaan Pekerja di bawah pimpinan Direktur Pengelola sesuai kebijakan/ pedoman di bidang Sumber Daya Manusia;
12. Melaporkan tugas-tugas sebagaimana tersebut di atas kepada Direktur Utama;

Managing Director

The Managing Director's main duty is to organise the management of the Company in the field of Terminal Services, Ship Services, Customer Services, as well as OHS and Management Systems. In carrying out his duties, Managing Director is authorised to carry out the following functions:

1. Leading and setting strategies as an elaboration of RJPP, RKAP and RKM in the Company in the field of terminal services, ship services, Customer Services and OHS and Quality Management Systems that have been determined, as well as other potential revenues with the aim of optimising revenue for the Company;
2. Coordinating, controlling and evaluating the implementation of ship services, terminal services, customer services and OHS and Management Systems from the strategies that have been set;
3. Coordinating, controlling and evaluating activities to fulfil the optimisation of port services, customer services both in the context of implementing the Company's strategy, carrying out tasks from the Government and from stakeholders,
4. Coordinating, controlling and evaluating the implementation of strategic activities of port service provision activities, among others, in the framework of guide and tug service management activities, management of loading and unloading of goods, management of passenger terminals, and management of information systems integrated with stakeholders,
5. Coordinating the implementation, evaluating and approving recording activities,
6. Administration and documentation as well as the preparation of Company management reports related to the field of management in a good, accurate, safe and timely manner both for internal and external purposes of the Company;
7. Providing approval or business decisions in the field of management in accordance with the delegation of authority from the Board of Directors;
8. Coordinating and evaluating the preparation and implementation of policies and Standard Operating Procedures (SPO) related to management activities;
9. Sign agreements, contracts or other engagements with third parties related to the management of the Company, especially in the field of management duties or based on the authority that has been delegated in the relevant policies and SPO;
10. Sign agreements, contracts or other engagements with third parties related to the management of the Company based on authorisation from President Director on behalf of Board of Directors for certain matters;
11. Ensuring the implementation of Employee development under the Managing Director's leadership in accordance with policies/guidelines in the field of Human Capital;
12. Reporting the duties as mentioned above to the President Director;

13. Mengoordinasikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan dan kegiatan-kegiatan pada setiap bidang di bawah Direktur Pengelola.

MASA JABATAN DIREKSI

Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dalam hal masa jabatan Anggota Direksi berakhir dan RUPS belum dapat menetapkan penggantinya, maka tugas-tugas anggota Direksi yang lowong tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengisian jabatan anggota Direksi yang lowong. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

1. Meninggal dunia;
2. Masa jabatannya berakhir, termasuk mengundurkan diri dari jabatannya;
3. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
4. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan termasuk rangkap jabatan yang dilarang.

PERSYARATAN DIREKSI

1. Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi seseorang harus memenuhi persyaratan Materil, yaitu:
   a. Keahlian;
   b. Integritas;
   c. Kepemimpinan;
   d. Pengalaman;
   e. Jujur;
   f. Perilaku yang baik;
   g. Dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan.
2. Selain memenuhi kriteria huruf a di atas, untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi Perusahaan harus memenuhi syarat formal, yaitu orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
   a. Dinyatakan pailit;
   b. Menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN, Anak Perusahaan dan/atau badan usaha lainnya dinyatakan pailit; atau
   c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara, BUMN, Anak Perusahaan dan/atau badan usaha lainnya dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

13. Coordinating and evaluating policies and activities in each field under the Managing Director.

BOARD OF DIRECTORS' TENURE

The tenure of a member of Board of Directors is set at 5 (five) years, and may be reappointed for 1 (one) tenure. In the event that the tenure of a member of Board of Directors expires and the GMS has not been able to determine his/her successor, duties of the vacant member of Board of Directors shall be carried out in accordance with the provisions for filling vacant positions of members of Board of Directors. The Board of Directors member's tenure ends if:

1. He/she passed away;
2. His/her tenure ends, including resigning from his/her position;
3. Dismissed based on the GMS resolution;
4. No longer fulfils the requirements as a member of Board of Directors based on the provisions of the Company's Articles of Association and laws and regulations including prohibited concurrent positions.

BOARD OF DIRECTORS CRITERIA

1. To be appointed as a member of Board of Directors, a person must fulfil the material requirements, namely:
   a. Expertise;
   b. Integrity;
   c. Leadership;
   d. Experience;
   e. Honesty;
   f. Good behaviour;
   g. High dedication to advance and develop the Company.
2. In addition to fulfilling the criteria in letter a above, to be appointed as a member of Board of Directors of the Company must fulfil the formal requirements, namely an individual who is capable of performing legal acts, unless within 5 (five) years prior to his/her appointment has been:
   a. Declared bankrupt;
   b. Be a member of Board of Directors or Board of Commissioners found guilty of causing an SOE, Subsidiary and/or other business entity to be declared bankrupt; or
   c. Convicted of a criminal offence that is detrimental to State finances, SOEs, subsidiaries and/or other business entities and/or related to the financial sector.

Pemenuhan persyaratan tersebut, dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Direksi dan surat tersebut disimpan oleh Perusahaan.

3. Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, selain memenuhi syarat meteril dan syarat formal sebagaimana point a dan b di atas, maka seseorang juga harus memenuhi syarat lain sebagai berikut:
   a. Bukan pengurus partai politik, calon anggota legislative dan/atau anggota legislatif pada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
   b. Bukan calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah, termasuk penjabat kepala/wakil kepala daerah;
   c. Tidak menjabat sebagai anggota Direksi pada BUMN atau Anak Perusahaan yang bersangkutan selama 2 (dua) periode;
   d. Tidak sedang menjabat sebagai pejabat pada kementerian/lembaga, anggota Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas pada BUMN lain, anggota Direksi pada BUMN lain, anggota Direksi pada Anak Perusahaan dan/atau badan usaha lainnya;
   e. Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi;
   f. Memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melakukan tugasnya, yang dinyatakan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan;
   g. Sehat jasmani dan rohani, yakni tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi, yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit;
   h. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

4. Persyaratan lainnya
   Selain memenuhi persyaratan umum, pengangkatan anggota Direksi juga dilaksanakan dengan memperhatikan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI

Secara lebih rinci, pedoman dan tata tertib kerja Direksi diatur dalam tentang Tata Laksana Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (*Board Manual*) antara lain berisi tentang petunjuk Tata Laksana kerja Direksi menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten, serta dapat menjadi acuan bagi Direksi dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai visi dan misi PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Dengan adanya *Board Manual*,

Fulfilment of these requirements is evidenced by a statement letter signed by the prospective member of Board of Directors and the letter is kept by the Company.

3. To be appointed as a member of Board of Directors, in addition to fulfilling the material and formal requirements as point a and b above, a person must also fulfil other requirements as follows:
   a. Not a political party administrator, legislative candidate and/or legislative member of the House of Representatives, Regional Representative Council, Provincial Regional Representative Council, and Regency/City Regional Representative Council;
   b. Not a candidate for head/deputy head of the region and/or head/deputy head of the region, including the acting head/deputy head of the region;
   c. Not serving as a member of Board of Directors at the relevant SOE or Subsidiary for 2 (two) periods;
   d. Not currently serving as an official at a ministry/ agency, member of Board of Commissioners/ Supervisory Board at another SOE, member of Board of Directors at another SOE, member of Board of Directors at a Subsidiary and/or other business entity;
   e. Not currently holding a position that based on laws and regulations is prohibited to be concurrent with the position of member of Board of Directors;
   f. Have dedication and provide full time to perform their duties, which is stated in a statement letter from the person concerned;
   g. Physically and mentally healthy, i.e. not suffering from an illness that may hinder the performance of duties as a member of Board of Directors, as evidenced by a medical certificate from a hospital;
   h. Have a Taxpayer Identification Number (NPWP) and have performed the obligation to pay taxes for the last 2 (two) years.

4. Other requirements
   In addition to fulfilling the general requirements, the appointment of members of Board of Directors is also carried out with due observance of the requirements stipulated in the prevailing laws and regulations.

BOARD MANUAL OF BOARD OF DIRECTORS

In more detail, the guidelines and work procedures for Board of Directors are regulated in the Board of Directors and Board of Commissioners Work Procedures (Board Manual), among others, contains instructions for the Board of Directors work procedures explaining the stages of activity in a structured, systematic, easy to understand and can be carried out consistently, and can be a reference for Board of Directors in carrying out their respective duties to achieve the vision and mission of PT

diharapkan akan tercapai standar kerja yang tinggi selaras dengan prinsip-prinsip GCG. Pedoman Tata Laksana Kerja Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) telah disahkan berdasarkan Nomor HK.01/27/11/2/TKPT/UTMA/PLND-23 tanggal 27 November 2023 tentang Pedoman Tata Laksana Kerja Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Pedoman Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris dan Direksi Pelindo telah diperbaharui sesuai dengan aturan terbaru Kementerian BUMN yaitu Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

Pedoman tata tertib kerja Direksi dalam *Board Manual* PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dijelaskan secara khusus dalam Bab II, yang mencakup:

1. Fungsi Direksi
2. Keanggotaan Direksi
3. Independensi (Kemandirian) Direksi
4. Etika Jabatan Anggota Direksi
5. Tugas dan Wewenang Direksi
6. Kewajiban Direksi
7. Tanggung Jawab Direksi
8. Hak Direksi
9. Prinsip-prinsip Pengambilan Keputusan Direksi
10. Program Pengenalan dan Peningkatan Kapabilitas
11. Organ Pendukung Direksi
12. Penilaian Kinerja Direksi
13. Kriteria Evaluasi Kinerja Direksi
14. Hubungan Perusahaan dengan Sub Holding dan/atau Anak Perusahaan

KEBIJAKAN RANGKAP JABATAN DIREKSI

Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu:

1. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta;
2. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN;
3. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan atau daerah;
4. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan,
5. Pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
6. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan atau
7. Calon legislatif atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah.

Pelabuhan Indonesia (Persero). With the Board Manual, it is expected that high standards of work will be achieved in line with GCG principles. The Board of Commissioners and Board of Directors' Work Relationship Guidelines (Board Manual) have been approved based on Decree No. HK.01/27/11/2/TKPT/UTMA/PLND-23 dated November 27, 2023, regarding the Board of Commissioners and Board of Directors' Work Relationship Guidelines (Board Manual) of PT Pelabuhan Indonesia(Persero). Pelindo's Board Manual has been updated in accordance with the latest rules of the Ministry of SOEs, namely Regulation of the Minister of SOEs Number PER-02/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises and Regulation of the Minister of SOEs Number PER-03/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Capital of State-Owned Enterprises.

The guidelines and work procedures of Board of Directors in the Board Manual of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) are specifically described in Chapter II, which includes:

1. Functions of Board of Directors;
2. Membership of Board of Directors;
3. Independence of Board of Directors;
4. Job Ethics of Members of Board of Directors;
5. Duties and Authorities of Board of Directors;
6. Obligations of Board of Directors;
7. Responsibilities of Board of Directors;
8. Rights of Board of Directors;
9. Principles of Board of Directors Decision Making;
10. Induction and Capabilities Improvement Program;
11. Supporting Organs of Board of Directors;
12. Board of Directors Performance Appraisal;
13. Board of Directors Performance Evaluation Criteria;
14. Company Relationship with Subholding and/or Subsidiaries.

POLICY OF BOARD OF DIRECTORS' CONCURRENT POSITIONS

Members of Board of Directors are prohibited from holding concurrent positions as mentioned below, namely:

1. Member of Board of Directors at State-Owned Enterprises (SOEs), Regional-Owned Enterprises, Private-Owned Enterprises;
2. Member of Board of Commissioners/Supervisory Board in SOEs;
3. Other structural and functional positions in central and/or regional government agencies/institutions;
4. Other positions in accordance with the provisions in the laws and regulations,
5. Political party administrators and/or legislative candidates/members and/or candidates for Regional Head/Deputy Regional Head;
6. Other positions that may give rise to a conflict of interest; and/or
7. Legislative candidates or candidates for regional head/deputy regional head.

Selain jabatan rangkap sebagaimana dimaksud, anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai anggota Dewan Komisaris pada banda usaha lain, kecuali:

1. Dewan Komisaris pada Anak Perusahaan/perusahaan terafiliasi BUMN yang bersangkutan, selain sebagai komisaris utama; dan
2. Dewan Komisaris pada badan usaha lain untuk mewakili/memperjuangkan kepentingan BUMN sepanjang memperoleh izin dari Menteri.

Masa jabatan anggota Direksi BUMN yang memangku jabatan rangkap sebagai anggota Direksi Perusahaan berakhir terhitung sejak terjadi nya perangkapan jabatan tersebut. Berakhirnya jabatan Direksi dikukuhkan pemberhentiannya dengan Keputusan Menteri /RUPS.

In addition to concurrent positions as referred to, members of Board of Directors are prohibited from holding concurrent positions as members of Board of Commissioners at other business bureaus, except:

1. Board of Commissioners of subsidiaries/affiliated companies of the SOE concerned, other than as the president commissioner; and
2. Board of Commissioners in other business entities to represent/provide for the SOE's interests to the extent that they obtain permission from the Minister.

The tenure of a member of Board of Directors of an SOE who holds a concurrent position as a member of Board of Directors of the Company ends as of the occurrence of concurrent position. The end of tenure of Board of Directors is confirmed by the Ministerial Decree/GMS.

Tabel Rangkap Jabatan Direksi
Board of Directors Concurrent Position

Nama Name	**Jabatan** Position	**Jabatan pada Perusahaan/ Instansi Lain** Position at Other Companies/ Institutions	**Nama Perusahaan/** Instansi Lain Name of Other Companies/Institutions
Arif Suhartono	Direktur Utama President Director	-	-
Hambra*	Wakil Direktur Utama Deputy President Director	-	-
Mega Satria*	Direktur Keuangan Director of Finance	-	-
Ihsanuddin Usman**	Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Director of Human Capital and General Affairs	-	-
Prasetyo**	Direktur Strategi Director of Strategy	-	-
Boy Robyanto	Direktur Manajemen Risiko Director of Risk Management	-	-
Putut Sri Muljanto	Direktur Operasi Director of Operations	-	-
Dwi Fatan Lilyana***	Direktur SDM dan Umum Human Resources and General Affairs Director	-	-
Drajat Sulistyo***	Direktur Komersial Director of Commerce	-	-
Bachtiar Soeria Atmadja****	Direktur Keuangan Director of Finance	-	-
Hosadi Apriza Putra****	Direktur Pengembangan Usaha Director of Business Development	-	-
Muhammad Suriawan Wakan****	Direktur Teknik Director of Engineering	-	-

*Sehubungan dengan telah diangkat sebagai Direktur Keuangan PT Pertamina Patra Niaga pada tanggal 4 Juli 2025 maka dikukuhkan pemberhentian yang bersangkutan pada tanggal 19 September 2025.
**Berhenti menjabat sejak tanggal 25 Juni 2025
***Mulai menjabat sejak tanggal 25 Juni 2025
****Mulai menjabat sejak tanggal 19 September 2025
*Following the appointment as Finance Director of PT Pertamina Patra Niaga on July 4, 2025, the formal dismissal of was confirmed on September 19, 2025.
**Ceased to hold office as of June 25, 2025
***Assumed office as of June 25, 2025
****Assumed office as of September 19, 2025

PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN DIREKSI

Setiap anggota Direksi harus mematuhi etika terkait benturan kepentingan, sebagai berikut:

1. Wajib mengisi Daftar Khusus yang berisikan informasi kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perusahaan lain, termasuk bila tidak memiliki kepemilikan saham, serta secara berkala setiap akhir tahun melakukan pembaharuan (*updating*) dan wajib memberitahukan Perseroan bila ada perubahan data sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perusahaan apabila:
3. Terjadi perkara di depan Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
4. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
5. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud Poin a di atas, yang berhak mewakili Perseroan adalah:

6. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
7. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;

8. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan.

9. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi dan Pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional perusahaan, dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Perusahaan atau mengurangi keuntungan perusahaan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan.
10. Melakukan pengungkapan dalam hal terjadi benturan kepentingan dan anggota Direksi yang bersangkutan tidak boleh melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan Perseroan yang berkaitan dengan hal tersebut. Dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan perusahaan atau mengurangi keuntungan perusahaan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan.

KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

Seluruh Direksi telah melaporkan kepada Perseroan terkait kepemilikan saham yang dimiliki baik di Pelindo maupun di perusahaan lainnya. Kepemilikan saham masing-masing Direksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

MANAGEMENT OF BOARD OF DIRECTORS CONFLICT OF INTEREST

Each member of Board of Directors must comply with ethics related to conflicts of interest, as follows:

1. Must fill out a Special Register containing information on ownership of their shares and/or their families in other companies, including if they do not have share ownership, and periodically update at the end of each year and must notify the Company if there are changes to the data in accordance with the prevailing laws and regulations;

2. Members of Board of Directors are not authorized to represent the Company if:
3. There is a case before the Court between the Company and the concerned member of Board of Directors;
4. Concerned member of Board of Directors has a conflict of interest with the Company;
5. In the event of a situation as referred to in Point a above, those who are entitled to represent the Company are:
6. Other members of Board of Directors who do not have a conflict of interest with the Company;
7. Board of Commissioners in the event that all members of Board of Directors have a conflict of interest with the Company;
8. Other parties appointed by the GMS in the event that all members of Board of Directors or Board of Commissioners have a conflict of interest with the Company.
9. In the event of a conflict of interest, members of Board of Directors and Officers who report directly to the Board of Directors or have significant influence on Company policies and/or operations, are prohibited from taking actions that could harm the Company or reduce Company profits and are required to disclose conflicts of interest in every decision.

10. Make disclosures in the event of a conflict of interest and the member of Board of Directors concerned must not involve themselves in the Company's decision-making process relating to this matter. It is prohibited to take actions that could harm the Company or reduce Company profits and is required to disclose conflicts of interest in every decision.

BOARD OF DIRECTORS SHARE OWNERSHIP

The entire Board of Directors has submitted a report to the Company regarding the ownership of shares both in Pelindo and in other companies. The share ownership of each Board of Directors can be seen in the table below:

Tabel Kepemilikan Saham Direksi
Board of Directors Share Ownership

Nama Name	Jabatan Position	Kepemilikan Saham Share Ownership	
		Pelindo	Perusahaan Lain Other Companies
Arif Suhartono	Direktur Utama President Director	Nihil Nil	Nihil Nil
Hambra*	Wakil Direktur Utama Deputy President Director	Nihil Nil	Nihil Nil
Mega Satria*	Direktur Keuangan Director of Finance	Nihil Nil	Nihil Nil
Ihsanuddin Usman**	Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Director of Human Capital and General Affairs	Nihil Nil	Nihil Nil
Prasetyo**	Direktur Strategi Director of Strategy	Nihil Nil	Nihil Nil
Boy Robyanto	Direktur Manajemen Risiko Director of Risk Management	Nihil Nil	Nihil Nil
Putut Sri Muljanto	Direktur Operasi Director of Operations	Nihil Nil	Nihil Nil
Dwi Fatan Lilyana***	Direktur SDM dan Umum Human Resources and General Affairs Director	Nihil Nil	Nihil Nil
Drajat Sulistyo***	Direktur Komersial Director of Commerce	Nihil Nil	Nihil Nil
Bachtiar Soeria Atmadja****	Direktur Keuangan Director of Finance	Nihil Nil	Nihil Nil
Hosadi Apriza Putra****	Direktur Pengembangan Usaha Director of Business Development	Nihil Nil	Nihil Nil
Muhammad Suriawan Wakan****	Direktur Teknik Director of Engineering	Nihil Nil	Nihil Nil

*Sehubungan dengan telah diangkat sebagai Direktur Keuangan PT Pertamina Patra Niaga pada tanggal 4 Juli 2025 maka dikukuhkan pemberhentian yang bersangkutan pada tanggal 19 September 2025.
**Berhenti menjabat sejak tanggal 25 Juni 2025
***Mulai menjabat sejak tanggal 25 Juni 2025
****Mulai menjabat sejak tanggal 19 September 2025
*Following the appointment as Finance Director of PT Pertamina Patra Niaga on July 4, 2025, the formal dismissal of was confirmed on September 19, 2025
**Ceased to hold office as of June 25, 2025
***Assumed office as of June 25, 2025
****Assumed office as of September 19, 2025

RAPAT DIREKSI

KEBIJAKAN RAPAT

Rapat Direksi adalah rapat yang diselenggarakan oleh Direksi. Keputusan-keputusan yang mengikat dapat juga ditetapkan tanpa diadakan rapat Direksi, sepanjang keputusan itu disetujui secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi.

Hal-Hal Yang Memerlukan Pengambilan Keputusan Melalui Rapat Direksi

Direksi menetapkan hal-hal yang memerlukan pengambilan keputusan melalui rapat Direksi sebagai berikut:

1. Tindakan-tindakan terkait dengan pelaksanaan wewenang sesuai ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar.

BOARD OF DIRECTORS MEETINGS

MEETING POLICY

Board of Directors meeting is a meeting held by the Board of Directors. Binding decisions can also be made without holding a meeting, as long as the decision is approved in writing and signed by all members of Board of Directors.

Matters Requiring Decision-Making through a Board of Directors Meeting

Board of Directors determines matters that require decisionmaking through Board of Directors meeting as follows:

1. Actions related to the exercise of authority in accordance with provisions of Articles of Association.

2. Tindakan terkait pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan.

3. Tindakan strategis lainnya,

Jadwal Rapat
Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala paling sedikit sekali dalam 1 (satu) bulan, dan dalam rapat tersebut Direksi dapat mengundang Dewan Komisaris. Rapat Direksi dapat diadakan di luar jadwal rutin.

Tempat Pelaksanaan Rapat
Rapat Direksi dapat diadakan di tempat kedudukan Perusahaan atau di tempat kegiatan usaha Perusahaan atau di tempat lain di wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan Direksi.

Penyelenggaran Rapat Melalui Sarana Elektronik
Rapat Direksi dapat diselenggarakan melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

Panggilan Rapat
Panggilan rapat dilakukan secara tertulis oleh anggota Direksi dan disampaikan dalam jangka waktu sekurang-kurang 3 (tiga) hari kerja sebelum rapat diadakan. Panggilan rapat Direksi harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat serta menyertakan agenda dan materi rapat tersebut. Panggilan rapat Direksi dapat dilakukan melalui sarana elektronik

Agenda Rapat
Hanya anggota Direksi yang berhak mengajukan usulan agenda rapat. Usulan agenda rapat dikumpulkan oleh Sekretaris Perusahaan untuk diverifikasi kecukupan syarat-syarat untuk diajukan sebagai agenda rapat. Dalam hal terdapat usulan penambahan agenda rapat pada saat rapat akan segera berlangsung, maka harus disetujui oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dalam rapat tersebut.

Pimpinan Rapat
Seluruh rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak hadir maka telah diatur dalam Board Manual PT Pelabuhan Indonesia (Persero)

Kuorum Rapat
Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Direksi atau wakilnya. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu. Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang anggota Direksi lainnya.

2. Actions related to the procurement of goods and services in accordance with applicable provisions in the Company.
3. Other strategic actions.

Meeting Schedule
Board of Directors meetings shall be held periodically at least once in 1 (one) month, and in such meetings the Board of Directors may invite the Board of Commissioners. Board of Directors meetings may be held outside the regular schedule.

Meeting Place
Board of Directors meetings may be held at the Company's domicile or at the Company's place of business or at any other place in the Republic of Indonesia as determined by the Board of Directors.

Meeting Holding Through Electronic Media
Board of Directors meetings may be held through teleconferencing media, video conferencing or other electronic media that allow all participants of Board of Directors meetings to see and hear each other directly and participate in the meeting.

Meeting Summons
Summons to a meeting shall be made in writing by a member of Board of Directors and delivered within a period of at least 3 (three) working days before the meeting is held. The Board of Directors meeting summons must include the event, date, time and place of the meeting and include the agenda and materials of meeting. The summons for Board of Directors meeting may be made through electronic media.

Meeting Agenda
Only members of Board of Directors are entitled to propose the meeting agenda. The proposed meeting agenda is collected by Corporate Secretary to verify the adequacy of requirements to be submitted as a meeting agenda. In the event that there is a proposal to add to the meeting agenda when the meeting is about to take place, it must be approved by all members of Board of Directors present at the meeting.

Meeting Chairman
All meetings of Board of Directors are chaired by the President Director, in the absence of President Director, it has been regulated in the PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board Manual.

Meeting Quorum
Board of Directors meetings are legal and entitled to make binding decisions, if attended by more than 1/2 (one-half) of the total number of members of Board of Directors or their representatives. A member of BoD may be represented in the meeting only by another member of BoD based on a written authorisation given specifically for that purpose. A member of BoD may only represent one other member of BoD.

Dalam hal anggota Direksi tidak hadir dalam rapat rutin, maka anggota Direksi tersebut dapat mewakilkan kepada anggota Direksi lainnya dengan memberikan Surat Kuasa kehadiran dengan mencantumkan pernyataan persetujuan atau penolakan atas agenda rapat, dengan alasan-alasannya.

Kehadiran Dalam Rapat Direksi Yang Dilakukan Melalui Sarana Elektronik

Anggota Direksi dapat turut serta dalam rapat Direksi yang diadakan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat, dan keturutsertaan tersebut menyatakan kehadiran yang bersangkutan dalam rapat Direksi tersebut.

Etika Rapat

Setiap peserta rapat harus mendukung pelaksanaan rapat Direksi agar berjalan secara efektif. Tata tertib Rapat Direksi lebih lanjut diatur dalam Board Manual PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Pengambilan Keputusan Dalam Rapat

1. Keterlibatan dalam Proses Pengambilan Keputusan
   Direksi wajib terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan dalam rapat. Untuk itu, Anggota Direksi yang tidak hadir pada saat pengambilan keputusan akan dilaksanakan harus dihubungi untuk segera kembali mengikuti proses rapat. Jika tidak berhasil dihubungi, maka peserta rapat tersebut dianggap menyetujui keputusan rapat yang diambil.
2. Pengambilan Keputusan
   Keputusan rapat Direksi ditetapkan dengan musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai kesepakatan maka keputusan ditetapkan dengan suara terbanyak, dengan mekanisme yang telah diatur dalam dalam Board Manual PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Perbedaan Pendapat (*Dissenting Opinion*)

Perbedaan pendapat yang terjadi harus dimasukkan dalam Risalah Rapat. Perbedaan pendapat tidak berarti memberikan hak kepada anggota Direksi yang bersangkutan untuk tidak melaksanakan hasil keputusan rapat. Tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi di luar yang diputuskan oleh rapat Direksi menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan sampai dengan tindakan dimaksud disetujui oleh rapat Direksi.

Risalah Rapat

Setiap rapat Direksi harus dibuatkan risalah rapat. Risalah rapat ditandatangani oleh pimpinan rapat dan seluruh anggota Direksi yang hadir dan diadministrasikan oleh Sekretaris Perusahaan. Risalah rapat Direksi disampaikan kepada seluruh Direksi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja. Setiap anggota Direksi berhak mendapatkan salinan risalah rapat.

In the event that a member of Board of Directors is absent from a regular meeting, the member of Board of Directors may represent another member of Board of Directors by providing a Power of Attorney to attend by including a statement of approval or rejection of the meeting agenda, with the reasons.

Board of Directors Meeting Attendance Through Electronic Media

A member of Board of Directors may participate in the Board of Directors meeting held through teleconference, video conference, or other electronic means that allow all participants of the Board of Directors meeting to see and hear each other directly and participate in the meeting, and such participation certifies the presence of person concerned in the Board of Directors meeting.

Meeting Ethics

Each meeting participant must support the Board of Directors meeting to run effectively. The rules of Board of Directors Meeting are further regulated in the PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board Manual.

Decision-Making in Meetings

1. Involvement in the Decision-Making Process
   Board of Directors must be involved in every decision-making process in the meeting. For this reason, members of Board of Directors who are not present at the time of decision-making must be contacted to immediately return to the meeting process. If they cannot be contacted, then the meeting participants are deemed to approve the meeting decisions taken.
2. Decision Making
   The Board of Directors meeting decision is determined by deliberation for consensus, if no agreement is reached, the decision is determined by a majority vote, with the mechanism regulated in the PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board Manual.

Dissenting Opinion

Dissenting opinions that occur must be included in the Minutes of Meeting. Dissenting opinion does not mean giving the relevant member of Board of Directors the right not to implement the meeting's decision. Actions taken by members of Board of Directors outside those decided by the Board of Directors meeting are the personal responsibility of the person concerned until the action is approved by the Board of Directors meeting

Minutes of Meeting

Minutes of each Board of Directors meeting must be taken. The minutes of meeting are signed by the chairman of meeting and all members of Board of Directors present and administered by the Corporate Secretary. Minutes of the Board of Directors meeting shall be submitted to all Board of Directors no later than 7 (seven) business days. Each member of Board of Directors is entitled to obtain a copy of the minutes of meeting.

Evaluasi Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya

Dalam rangka memastikan tindak lanjut rapat sebelumnya, maka Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap hal-hal yang perlu ditindaklanjuti.

Kehadiran Dewan Komisaris Dalam Rapat Direksi

Anggota Dewan Komisaris dapat menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan Dewan Komisaris terhadap hal-hal yang dibicarakan atas undangan dari Direksi atau atas permintaan Dewan Komisaris.

Pengambilan Keputusan Secara Sirkuler

Keputusan dapat pula diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan. Ketentuan keputusan yang diambil dalam bentuk Rapat Sirkuler telah diatur dalam dalam *Board Manual* PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Evaluation of Follow-up of Previous Meetings

In order to ensure the follow-up of the previous meeting, Board of Directors must evaluate the matters that need to be followed up. Board of Commissioners

Attendance in Board of Directors Meeting

Members of Board of Commissioners may attend the Board of Directors meeting and provide views of Board of Commissioners on matters discussed at the invitation of Board of Directors or at the Board of Commissioners' request.

Circular Decision-Making

Decisions can also be made outside the Board of Directors meeting as long as all members of Board of Directors agree on the method and material to be decided. Provisions for decisions taken in the form of Circular Meetings have been regulated in the PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board Manual.

RENCANA RAPAT DIREKSI

Adapun rencana rapat Direksi selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BOARD OF DIRECTORS MEETING PLAN

The Board of Directors meeting plan during 2025 is as follows:

1	**Rencana Rapat Direksi Januari**	**Board of Directors Meeting Plan for January**
1.1	**Minggu ke-1**	**Week 1**
	CEO Direction	CEO Direction
	Arah Pengembangan Sub Holding dan Anak Perusahaan Tahun 2025	Development Direction for Subholdings and Subsidiaries in 2025
	Tindak Lanjut Optimalisasi Pelabuhan Cabang	Follow-up on Branch Port Optimization
	Progress Penyelesaian Kontrak Kerja Sama yang Jatuh Tempo Tahun 2025	Progress on Completion of Cooperation Contracts Due in 2025
	Update Pemurnian Bisnis	Business Refinement Update
	Update RKAP 2025 dan Usulan Investasi (Capex) 2025	Update on 2025 Work Plan and Budget (RKAP) and 2025 Investment Proposal (Capex)
	Laporan Monitoring Dewan Pengawas	Supervisory Board Monitoring Report
	Update NPEA	NPEA Update
	Lain - lain	Other
1.2	**Minggu ke-3**	**Week 3**
	CEO Direction	CEO Direction
	Pembahasan RJPP	Discussion on the Long-Term Plan (RJPP)
	Optimalisasi Lahan PT Pelindo	Optimization of PT Pelindo Land
	Revenue Sharing Subholding	Subholding Revenue Sharing
	Realisasi Kinerja PT Pelabuhan Indonesia (Persero) s.d Desember 2024	Performance Realization of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) as of December 2024
	Pembahasan Materi Rakomdir Januari 2025	Discussion of January 2025 Board Meeting's Material
	Update dan *progress* evaluasi dan keamanan sistem IT	Update and Progress on IT System Evaluation and Security
	Update Temuan BPK	Update on Audit Board Findings
	Lain-lain	Other
2	**Rencana Rapat Direksi Februari**	**Board of Directors Meeting Plan for February**
2.1	**Minggu ke-1**	**Week 1**
	CEO Direction	CEO Direction
	Laporan Manajemen PT Pelabuhan Indonesia (Persero) periode Januari 2025	Management Report of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) for January 2025

	Update Pengerukan di Seluruh Wilayah Kerja Pelindo	Dredging Update on All Pelindo Working Areas
	Rencana Relokasi Alat dan Pengadaan Peralatan Pelabuhan	Port Equipment Relocation and Procurement Plan
	Rencana Investasi Baru dari Regional	New Investment Plan from the Region
	Update Temuan Audit	Audit Findings Update
	Lain-lain	Miscellaneous
2.2	**Minggu ke-3**	**Week 3**
	CEO Direction	CEO Direction
	Kerjasama Lahan dengan Instansi Pemerintah	Land Cooperation with Government Agencies
	Progress Proyek Strategis dan Isu Strategis Bidang Teknik di Regional	Progress of Strategic Projects and Technical Strategic Issues in the Region
	Update Kerjasama Usaha dengan Mitra Strategis di Pelindo	Business Cooperation Update with Strategic Partners at Pelindo
	Pembahasan Materi Rakomdir Februari 2025	Discussion of February 2025 Board Meeting's Material
	Update dan *progress* evaluasi dan keamanan sistem IT	Update and Progress on IT System Evaluation and Security
	Update Temuan BPK	Update on Auditor's Audit Findings
	Lain-lain	Miscellaneous
3	**Rencana Rapat Direksi Maret**	**Board of Directors Meeting Plan for March**
3.1	**Minggu ke-1**	**Week 1**
	CEO Direction	CEO Direction
	Laporan Manajemen PT Pelabuhan Indonesia (Persero) periode Februari 2025	PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Management Report for February 2025
	Finalisasi Audit Laporan Keuangan PT Pelabuhan IndonesiaTahun 2024	Finalization of the 2024 Audit of PT Pelabuhan Indonesia's Financial Statements
	Percepatan Kerjasama Usaha	Acceleration of Business Cooperation
	Penyusunan Peraturan Direksi tentang Kerjasama Usaha di Lingkungan Pelindo	Drafting of Director's Regulations on Business Cooperation within Pelindo
	Lain-lain	Miscellaneous
3.2	**Minggu ke-3**	**Week 3**
	CEO Direction	CEO Direction
	Pengembangan Infrastruktur dan Peralatan Pelabuhan	Port Infrastructure and Equipment Development
	Update dan *progress* evaluasi dan keamanan sistem IT	Update and Progress on IT System Evaluation and Security
	Pembahasan Materi Rakomdir Maret 2025	Discussion of March 2025 Board Meeting's Material
	Update Temuan BPK	Update on BPK Findings
	Lain-lain	Miscellaneous
4	**Rencana Rapat Direksi April**	**Board of Directors Meeting Plan for April**
4.1	**Minggu ke-1**	**Week 1**
	CEO Direction	CEO Direction
	Laporan Manajemen PT Pelabuhan Indonesia (Persero) periode Maret 2025	PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Management Report for March 2025
	Pengembangan Kawasan Industri dan/atau Logistik	Development of Industrial and/or Logistics Estates
	Pengembangan Layanan Operasi Pelabuhan diluar Area Kerja Perusahaan	Development of Port Operational Services Outside the Company's Work Area
	Penyusunan dan Standarisasi Master Data Operasional	Preparation and Standardization of Operational Master Data
	Lain-lain	Miscellaneous
4.2	**Minggu ke-3**	**Week 3**
	CEO Direction	CEO Direction
	Progress Proyek Strategis dan Isu Strategis Bidang Teknik di Regional	Progress of Strategic Projects and Technical Strategic Issues in the Region
	Realisasi Kinerja PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Triwulan I 2025	Performance of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) for the First Quarter of 2025

	Progress Penyusunan Pedoman Manajemen Proyek	Progress on the Preparation of Project Management Guidelines
	Pembahasan Materi Rakomdir April 2025	Discussion of April 2025 Board Meeting's Materials
	Update dan *progress* evaluasi dan keamanan sistem IT	Update and Progress on IT System Evaluation and Security
	Update Temuan BPK	BPK Findings Update
	Lain-lain	Miscellaneous
5	**Rencana Rapat Direksi Mei**	**Board of Directors Meeting Plan for May**
5.1	**Minggu ke-1**	**Week 1**
	CEO Direction	CEO Direction
	Laporan Manajemen PT Pelabuhan Indonesia (Persero) periode April 2025	PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Management Report for April 2025
	Update Kerjasama Usaha dengan Mitra Strategis di Pelindo	Update on Business Cooperation with Strategic Partners at Pelindo
	Konsolidasi Data Aset dan Program Kerja TIK seluruh Regional	Consolidation of Asset Data and ICT Work Programs All Regions
	Lain-lain	Miscellaneous
5.2	**Minggu ke-3**	**Week 3**
	CEO Direction	CEO Direction
	Progress Desain dan Implementasi *Dashboard Executive Summary*	Progress on Design and Implementation of the Executive Summary Dashboard
	Pembahasan Materi Rakomdir bulan Mei 2025	Discussion of May 2025 Board Meeting's Materials
	Update dan progress evaluasi dan keamanan sistem IT	Update and Progress on IT System Evaluation and Security
	Update Temuan BPK	Update on Audit Board Findings
	Lain-lain	Miscellaneous
6	**Rencana Rapat Direksi Juni**	**Board of Directors Meeting Plan for June**
6.1	**Minggu ke-1**	**Week 1**
	CEO Direction	CEO Direction
	Laporan Manajemen PT Pelabuhan Indonesia (Persero) periode Mei 2025	PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Management Report for May 2025
	Rencana Pelimpahan Terminal Non Petikemas yang dikelola oleh Cabang Pelabuhan kepada Sub Holding	Planned Transfer of Non-Container Terminals Managed by Port Branches to Sub-Holdings
	Lain-lain	Miscellaneous
6.2	**Minggu ke-3**	**Week 3**
	CEO Direction	CEO Direction
	Progress Proyek Strategis dan Isu Strategis Bidang Teknik di Regional	Progress on Strategic Projects and Technical Strategic Issues in the Region
	Pembahasan Materi Rakomdir Juni 2025	Discussion of June 2025 Board Meeting's Materials
	Update dan *progress* evaluasi dan keamanan sistem IT	Update and Progress on IT System Evaluation and Security
	Update Temuan BPK	Update on Audit Board Findings
	Lain-lain	Miscellaneous
7	**Rencana Rapat Direksi Juli**	**Board of Directors Meeting Plan for July**
7.1	**Minggu ke-1**	**Week 1**
	CEO Direction	CEO Direction
	Laporan Manajemen PT Pelabuhan Indonesia (Persero) periode Juni 2025	PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Management Report for June 2025
	Update Progress Dashboarding Pelaporan Peralatan Pelabuhan	Port Equipment Reporting Dashboard Progress Update
	Realisasi Kinerja Semester I 2025	First Semester Performance Realization 2025
	Lain-lain	Miscellaneous
7.2	**Minggu ke-3**	**Week 3**
	CEO Direction	CEO Direction

	Progress Optimalisasi Peralatan	Equipment Optimization Progress
	Realisasi Investasi Semester I 2025	Investment Realization for Semester I 2025
	Realisasi KPI dan RKM Semester I 2025	KPI and RKM Realization for Semester I 2025
	Pembahasan Materi Rakomdir Juli 2025	Discussion of July 2025 Board Meeting's Material
	Update dan progress evaluasi dan keamanan sistem IT	Update and Progress on IT System Evaluation and Security
	Update Temuan BPK	Update on Audit Board Findings
	Lain - lain	Miscellaneous
8	**Rencana Rapat Direksi Agustus**	**Board of Directors Meeting Plan for August**
8.1	**Minggu ke-1**	**Week 1**
	CEO Direction	CEO Direction
	Laporan Manajemen PT Pelabuhan Indonesia (Persero) periode Juli 2025	PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Management Report for July 2025
	Progress Standardisasi Teknis Peralatan	Progress on Equipment Technical Standardization
	Progress Pengembangan Kawasan Industri dan/ atau Logistik	Progress on Industrial and/or Logistics Estate Development
	Standarisasi Sistem Manajemen Mutu	Quality Management System Standardization
	Lain – lain	Miscellaneous
8.2	**Minggu ke-3**	**Week 3**
	CEO Direction	CEO Direction
	Progress Dashboard Monitoring Availability dan Pemeliharaan Fasilitas Pelabuhan	Progress on Port Facility Availability and Maintenance Monitoring Dashboard
	Progress Penyusunan Database Sertifikasi Health, Safety, Security Environment (HSSE) *Management System*	Progress on Health, Safety, Security, Environment (HSSE) Management System Certification Database Development
	Pembahasan Materi Rakomdir Agustus 2025	Discussion of August 2025 Board Meeting's Material
	Update dan *progress* evaluasi dan keamanan sistem IT	Update and Progress on IT System Evaluation and Security
	Update Temuan BPK	Update on Audit Board Findings
	Lain - lain	Miscellaneous
9	**Rencana Rapat Direksi September**	**Board of Directors Meeting Plan for September**
9.1	**Minggu ke-1**	**Week 1**
	CEO Direction	CEO Direction
	Laporan Manajemen PT Pelabuhan Indonesia (Persero) periode Agustus 2025	PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Management Report for August 2025
	Progress Pengembangan Aplikasi TCS	TCS Application Development Progress
	Update Progress Pengembangan Infrastruktur dan Peralatan Pelabuhan	Port Infrastructure and Equipment Development Progress Update
	Lain - lain	Miscellaneous
9.2	**Minggu ke-3**	**Week 3**
	CEO Direction	CEO Direction
	Progress Peningkatan Pelayanan melalui Key Account Management Terintegrasi	Service Improvement Progress through Integrated Key Account Management
	Tantiem BOD BOC *Subholding*	Board of Directors (BOD) and Board of Commissioners (BOC) Subholding Bonuses
	Pembahasan Materi Rakomdir September 2025	Discussion of September 2025 Board Meeting's Material
	Update dan *progress* evaluasi dan keamanan sistem IT	Update and Progress on IT System Evaluation and Security
	Update Temuan BPK	Update on Audit Board Findings
	Lain - lain	Miscellaneous
10	**Rencana Rapat Direksi Oktober**	**Board of Directors Meeting Plan for October**
10.1	**Minggu ke-1**	**Week 1**
	CEO Direction	CEO Direction
	Penyampaian Laporan Usulan Investasi 2025	Submission of 2025 Investment Proposal Report

	Laporan Manajemen PT Pelabuhan Indonesia (Persero) periode September 2024	PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Management Report for September 2024
	Lain – lain	Miscellaneous
10.2	**Minggu ke-3**	**Week 3**
	CEO Direction	CEO Direction
	Laporan Kinerja Triwulan III 2025	Performance Report for Quarter 3, 2025
	Usulan Percepatan Penyerapan Investasi 2025	Proposed Investment Absorption Acceleration 2025
	Progress Mapping Aset Lahan berdasarkan Alas Hak	Progress Mapping of Land Assets Based on Land Rights
	Laporan Realisasi Investasi Triwulan III 2025	Investment Realization Report for Quarter 3, 2025
	Pembahasan Materi Rakomdir bulan Oktober 2025	Discussion of October 2025 Board Meeting's Materials
	Update dan *progress* evaluasi dan keamanan sistem IT	Update and Progress on IT System Evaluation and Security
	Update Temuan BPK	Update on Audit Board Findings
	Lain - lain	Miscellaneous
11	**Rencana Rapat Direksi November**	**Board of Directors Meeting Plan for November**
11.1	**Minggu ke-1**	**Week 1**
	CEO Direction	CEO Direction
	Laporan Manajemen PT Pelabuhan Indonesia (Persero) periode Oktober 2025	Management Report for PT Pelabuhan Indonesia (Persero) for October 2025
	Update Usulan RKAP 2026 dan Usulan Investasi (Capex) 2026	Update on Proposed 2026 Work Plan and Budget (Capex) and Proposed 2026 Investment
	Usulan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan 2026	Proposed 2026 Company Work Plan and Budget
	Review Pelaksanaan Ketentuan Tambahan Tarif atas Pelayanan Jasa Kapal	Review of Implementation of Additional Tariff Provisions for Ship Services
	Update Temuan Audit	Update on Audit Findings
	Lain - lain	Miscellaneous
11.2	**Minggu ke-3**	**Week 3**
	CEO Direction	CEO Direction
	Progress Database Kerjasama Lahan	Progress on the Cooperation Database Land
	Pembahasan Materi Rakomdir bulan November 2025	Discussion of November 2025 Board Meeting's Material
	Update dan *progress* evaluasi dan keamanan sistem IT	Update and Progress on IT System Evaluation and Security
	Update Temuan BPK	Update on Audit Board (BPK) Findings
	Lain - lain	Others
12	**Rencana Rapat Direksi Desember**	**Board of Directors Meeting Plan for December**
12.1	**Minggu ke-1**	**Week 1**
	CEO Direction	CEO Direction
	Laporan Manajemen PT Pelabuhan Indonesia (Persero) periode November 2025	PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Management Report for November 2025
	Usulan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan 2026	Proposed 2026 Company Work and Budget Plan
	Update Persiapan Nataru	Update on Christmas and New Year Preparations
	Lain - lain	Miscellaneous
12.2	**Minggu ke-3**	**Week 3**
	CEO Direction	CEO Direction
	Update Progress Standardisasi Teknis Peralatan	Update on Equipment Technical Standardization Progress
	Laporan RKM Strategis Kantor Pusat	Head Office Strategic Work Plan Report
	Pembahasan Materi Rakomdir Desember 2025	Discussion of December 2025 Board Meeting's Material
	Realisasi KPI dan RKM Akhir Tahun 2025	Realization of KPIs and Work Plans at the End of 2025
	Update dan *progress* evaluasi dan keamanan sistem IT	Update and Progress on IT System Evaluation and Security
	Update Temuan BPK	Update on Audit Board Findings
	Lain - lain	Others

AGENDA, TANGGAL DAN PESERTA RAPAT DIREKSI

Sepanjang tahun 2025, agenda, tanggal dan peserta Rapat Direksi adalah sebagai berikut.

AGENDA, DATE AND PARTICIPANTS OF BOARD OF DIRECTORS' MEETINGS

Throughout 2025, the agenda, dates and participants of Board of Directors Meetings are as follows.

Tabel Rapat Direksi
Board of Directors Meetings

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Attendance
1	Selasa, 07 Januari 25 Tuesday, January 7, 2025	• CEO Direction • Pembahasan Kajian Evaluasi Peta Peran dan Struktur Organisasi Regional, Sub Regional dan Cabang – Confidential • Lain – lain • CEO Direction • Discussion of the Role Map and Organizational Structure Evaluation Study for Regional, Sub-Regional, and Branch Offices – Confidential • Miscellaneous	Arif Suhartono	Hadir Present
			Hambra	Hadir Present
			Mega Satria	Hadir Present
			Ihsanuddin Usman	Hadir Present
			Prasetyo	Hadir Present
			Boy Robyanto	Hadir Present
			Putut Sri Muljanto	Hadir Present
2	Senin, 20 Januari 2025 Monday, January 20, 2025	• CEO Direction • Pembahasan Nominated Talent Klaster Logistik Laut • Kajian Kerjasama Platform Marketplace Logistic dengan Crimson Logic Singapore • Laporan Implementasi Single ERP dan Platform Marketplace Maritime • Permohonan Arahan Terkait Permasalahan Klaim Tanah oleh Sdr. Mawardi pada Pelabuhan Gilimas, Lembar • Pembahasan Kajian Nilai dan Komersialisasi Ruko Enggano Megah • Laporan Kinerja Tahun 2024 (*Unaudited*) • CEO Direction • Discussion of Nominated Talent for the Maritime Logistics Cluster • Study of Logistics Marketplace Platform Collaboration with Crimson Logic Singapore • Report on the Implementation of Single ERP and Maritime Marketplace Platform • Request for Guidance Regarding Land Claim Issues by Mr. Mawardi at Gilimas Port, Lembar • Discussion of the Value and Commercialization Study for Enggano Megah Shophouses • 2024 Performance Report (Unaudited)	Arif Suhartono	Hadir Present
			Hambra	Hadir Present
			Mega Satria	Hadir Present
			Ihsanuddin Usman	Hadir Present
			Prasetyo	Hadir Present
			Boy Robyanto	Hadir Present
			Putut Sri Muljanto	Hadir Present
3	Selasa, 4 Februari 2025 Tuesday, February 4, 2025	• CEO Direction • *Update* Progres Pekerjaan Kalibaru • Lain – lain • CEO Direction • Kalibaru Work Progress Update • Miscellaneous	Arif Suhartono	Hadir Present
			Hambra	Hadir Present
			Mega Satria	Hadir Present
			Ihsanuddin Usman	Hadir Present
			Prasetyo	Hadir Present
			Boy Robyanto	Hadir Present
			Putut Sri Muljanto	Hadir Present

Tabel Rapat Direksi
Board of Directors Meetings

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Attendance
4	Selasa, 18 Februari 2025 Tuesday, February 18, 2025	• CEO Direction • Pembahasan Lanjutan Nominated Talent • Klaster Logistik Laut (Confidential) • Progress Kerjasama Jakarta Integrated • Green Terminal (JIGT) Kalibaru • Rencana Perubahan Zona PAI (Perikanan) • di Pelabuhan Benoa • Pembahasan Laporan Kinerja Januari 2025 • Rencana Pengerukan Alur Bengkulu • *Update* Kajian Restrukturisasi PT PII • Pemaparan Hasil Kajian Hukum Kepemilikan Lahan yang Dilakukan dan Dibiayai oleh BUMN untuk Pembangunan Pelabuhan • Lain – lain • CEO Direction • Continued Discussion of Nominated Talent • Marine Logistics Cluster (Confidential) • Progress of Jakarta Integrated Cooperation • Kalibaru Green Terminal (JIGT) • Planned Changes to PAI (Fisheries) Zone at Benoa Port • Discussion of the January 2025 Performance Report • Bengkulu Channel Dredging Plan • Update on PT PII Restructuring Study • Presentation of the Results of Land Ownership Legal Study Conducted and Funded by State-Owned Enterprises for Port Development • Miscellaneous	Arif Suhartono	Hadir Present
			Hambra	Hadir Present
			Mega Satria	Hadir Present
			Ihsanuddin Usman	Hadir Present
			Prasetyo	Hadir Present
			Boy Robyanto	Hadir Present
			Putut Sri Muljanto	Hadir Present
5	Rabu, 5 Maret 2025 Wednesday, March 5, 2025	• CEO Direction • Persertipikatan Tanah Hasil Reklamasi Terminal Kalibaru • Persiapan Penyaluran Bantuan Uang Sembako Tahun 2025 bagi Pensiunan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) • Lain – lain • CEO Direction • Land Certification for Reclamation Results from Kalibaru Terminal • Preparation for Distribution of 2025 Basic Food Assistance for Retired Employees of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) • Miscellaneous	Arif Suhartono	Hadir Present
			Hambra	Hadir Present
			Mega Satria	Hadir Present
			Ihsanuddin Usman	Hadir Present
			Prasetyo	Hadir Present
			Boy Robyanto	Hadir Present
			Putut Sri Muljanto	Hadir Present
6	Selasa, 25 Maret 2025 Tuesday, March 25, 2025	• CEO Direction • *Update Roadmap* Transformasi Pelindo dan Rencana Sinergi Ekosistem Maritim • Kompensasi atas Dampak Biaya Pekerjaan Pembangunan Terminal Kijing • Penyelesaian Hak dan Kewajiban Antara PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan PT Istaka Karya (Persero) • Perubahan Skema Relokasi Bisnis PT Perindo menjadi Ganti Rugi Aset Eksisting PT Perindo di Pelabuhan Benoa • Pelaksanaan *Refinancing* Utang PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways • CEO Direction • Update on Pelindo's Transformation Roadmap and Maritime Ecosystem Synergy Plan • Compensation for the Impact of Kijing Terminal Construction Costs • Settlement of Rights and Obligations Between PT Pelabuhan Indonesia (Persero) and PT Istaka Karya (Persero) • Change of PT Perindo's Business Relocation Scheme to Compensation for PT Perindo's Existing Assets at Benoa Port • Implementation of Debt Refinancing of PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways	Arif Suhartono	Hadir Present
			Hambra	Hadir Present
			Mega Satria	Hadir Present
			Ihsanuddin Usman	Hadir Present
			Prasetyo	Hadir Present
			Boy Robyanto	Hadir Present
			Putut Sri Muljanto	Hadir Present

Tabel Rapat Direksi
Board of Directors Meetings

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Attendance
7	Selasa, 15 April 2025 Tuesday, April 15, 2025	• CEO Direction • Standarisasi Remunerasi Pelindo *Group* • Finalisasi Kajian Evaluasi Peta Peran dan Struktur Organisasi Regional, Sub Regional dan Cabang • Persetujuan Renovasi Gedung Sorseni Walang untuk *Record Center* Kantor Pusat Pelindo • Pembahasan Rencana Penggunaan Lahan/Tanah dan/atau Bangunan/Ruangan Untuk Kepentingan Asrama Kepolisian di Lingkungan Pelabuhan Tg Priok • *Update Progress Improvement* SSC dan Pendanaan Tahun 2025 • Pelaksanaan Pengerukan Darurat di Bengkulu • Lain – lain • CEO Direction • Pelindo Group Remuneration Standardization • Finalization of the Evaluation Study of Role Map and Regional, Sub-Regional, and Branch Organizational Structure • Approval of the Renovation of Sorseni Walang Building for Pelindo Head Office Record Center • Discussion of the Planned Use of Land/Soil and/or Buildings/Rooms for the Purpose of a Police Dormitory in Tanjung Priok Port Area • Update on SSC Improvement Progress and Funding for 2025 • Implementation of Emergency Dredging in Bengkulu • Miscellaneous	Arif Suhartono	Hadir Present
			Hambra	Hadir Present
			Mega Satria	Hadir Present
			Ihsanuddin Usman	Hadir Present
			Prasetyo	Hadir Present
			Boy Robyanto	Hadir Present
			Putut Sri Muljanto	Hadir Present
8	Kamis, 24 April 2025 Thursday, April 24, 2025	• CEO Direction • Bonus Pekerja PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Tahun 2024 – Confidential • Lain – lain • CEO Direction • PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Employee Bonuses for 2024 – Confidential • Miscellaneous	Arif Suhartono	Hadir Present
			Hambra	Hadir Present
			Mega Satria	Hadir Present
			Ihsanuddin Usman	Hadir Present
			Prasetyo	Hadir Present
			Boy Robyanto	Hadir Present
			Putut Sri Muljanto	Hadir Present
9	Senin, 5 Mei 2025 Monday, May 5, 2025	• CEO Direction • Peta Peran Induk dan Anak Perusahaan Pelindo • Tindak Lanjut Pengerukan di Pelabuhan Baai Bengkulu • Usulan penyesuaian kebutuhan dana dan RKAP 2025 untuk pekerjaan pengerukan alur Bengkulu • Lain – lain • CEO Direction • Role Map of Pelindo's Parent and Subsidiary Companies • Follow-up on Dredging at Baai Port, Bengkulu • Proposed adjustments to funding requirements and the 2025 Work Plan and Budget (RKAP) for Bengkulu Channel dredging work • Miscellaneous	Arif Suhartono	Hadir Present
			Hambra	Hadir Present
			Mega Satria	Hadir Present
			Ihsanuddin Usman	Hadir Present
			Prasetyo	Hadir Present
			Boy Robyanto	Hadir Present
			Putut Sri Muljanto	Hadir Present

Tabel Rapat Direksi
Board of Directors Meetings

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Attendance
10	Selasa, 20 Mei 2025 Tuesday, May 20, 2025	• CEO Direction • *Progress Transfer Operatorship* SPTP • Laporan Kinerja s.d. April 2025 • [*Progress Update*] Rencana Penyesuaian atas Perjanjian Kerja Sama dan Aksi • Korporasi terhadap PTI pada Pelabuhan Kuala Tanjung • Pengesahan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2024 dan Persetujuan Laporan Valuasi Aktuaria Tahun 2024 pada Dana Pensiun Pelindo • Pengesahan Laporan Keuangan *Audited* Tahun 2024 pada Dana Pensiun Pelindo Purnakarya • Lain – lain • CEO Direction • SPTP Transfer Operatorship Progress • Performance Report up to April 2025 • [Progress Update] Adjustment Plan for the Cooperation Agreement and Action • Corporations against PTI at Kuala Tanjung Port • Ratification of the 2024 Audited Financial Statements and Approval of the 2024 Actuarial Valuation Report at Pelindo Pension Fund • Ratification of the 2024 Audited Financial Statements at Pelindo Purnakarya Pension Fund • Miscellaneous	Arif Suhartono	Hadir Present
			Hambra	Hadir Present
			Mega Satria	Hadir Present
			Ihsanuddin Usman	Hadir Present
			Prasetyo	Hadir Present
			Boy Robyanto	Hadir Present
			Putut Sri Muljanto	Hadir Present
11	Selasa, 17 Juni 2025 Tuesday, June 17, 2025	• Pelindo *Ports Security Overview* 2025 oleh Brigjend. Gogor • *Update* kinerja periode s.d. Mei 2025, RKAP tahun 2026, dan Pendanaan tahun 2025 • Usulan Penggunaan Laba Bersih dan Penarikan Dividen Anak Perusahaan Tahun Buku 2024 • Usulan Pelindo atas RPP Bidang Pelayaran • Pelindo Ports Security Overview 2025 by Brigadier General Gogor • Performance update for the period up to May 2025, 2026 Work Plan and Budget, and 2025 Funding • Proposed Use of Net Profit and Dividend Withdrawal of Subsidiaries for Fiscal Year 2024 • Pelindo's Proposal on the Shipping Sector RPP	Arif Suhartono	Hadir Present
			Hambra	Hadir Present
			Mega Satria	Hadir Present
			Ihsanuddin Usman	Hadir Present
			Prasetyo	Hadir Present
			Boy Robyanto	Hadir Present
			Putut Sri Muljanto	Hadir Present
12	Rabu, 18 Juni 2025 Wednesday, June 18, 2025	• CEO Direction • Progress Update Terminal Kalibaru • Rencana kerjasama dengan pemenang lelang pelimpahan STS di Tj Carat • *Update* Ekosistem Maritim • Rencana Pemanfaatan 2 (dua) Unit QCC • Panamax Eks TPK KOJA • Kerja Sama Agen Properti • Usulan Kenaikan Kelas Jabatan Tahun 2025 – *Confidential* • Lain – lain • CEO Direction • Progress Update on Kalibaru Terminal • Collaboration Plan with the Winner of STS Transfer Auction at Tj Carat • Maritime Ecosystem Update • Planned Utilization of 2 (two) QCC Units • Panamax Ex-TPK KOJA • Property Agent Cooperation • Proposed Job Promotion in 2025 – Confidential • Miscellaneous	Arif Suhartono	Hadir Present
			Hambra	Hadir Present
			Mega Satria	Hadir Present
			Ihsanuddin Usman	Hadir Present
			Prasetyo	Hadir Present
			Boy Robyanto	Hadir Present
			Putut Sri Muljanto	Hadir Present

Tabel Rapat Direksi
Board of Directors Meetings

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Attendance
13	Senin, 14 Juli 2025 Monday, July 14, 2025	• CEO Direction • *Update* pemilihan mitra cruise terminal BMTH • Ekosistem Kalibaru-Kajian Status Jalan NPEA • Update Hari Pelindo 2025 • Laporan Penyelesaian Permasalahan Hukum Strategis • Laporan Monitoring Risiko per Juni 2025 dan *Contingency Plan* • *Timeline* Pengembangan Pelabuhan Bengkulu • Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Anak Perusahaan Tahun Buku 2024 • Laporan Kinerja Semester I 2025 • Lain–lain • CEO Direction • Update on BMTH Cruise Terminal Partner Selection • Kalibaru Ecosystem - NPEA Road Status Review • Pelindo Day Update 2025 • Strategic Legal Issue Resolution Report • Risk Monitoring Report as of June 2025 and Contingency Plan • Bengkulu Port Development Timeline • Subsidiary Soundness Level Assessment Results for 2025 Book 2024 • First Semester 2025 Performance Report • Miscellaneous	Arif Suhartono	Hadir Present
			Hambra	Hadir Present
			Mega Satria	Hadir Present
			Boy Robyanto	Hadir Present
			Putut Sri Muljanto	Hadir Present
			Dwi Fatan Lilyana	Hadir Present
			Drajat Sulistyo	Hadir Present
			Arif Suhartono	Hadir Present
14	Kamis, 31 Juli 2025 Thursday, July 31, 2025	• CEO Direction • Permasalahan Tukar Menukar Tanah milik Pemerintah DKI Jakarta di Ancol Timur • Usulan Revisi RKAP Investasi 2025 • Lain – lain • CEO Direction • Issues in Jakarta Government Land Exchange in East Ancol • Proposed Revision of the 2025 Investment Work Plan and Budget (RKAP) • Miscellaneous	Arif Suhartono	Hadir Present
			Hambra	Tidak Hadir Absent
			Boy Robyanto	Hadir Present
			Putut Sri Muljanto	Hadir Present
			Dwi Fatan Lilyana	Hadir Present
			Drajat Sulistyo	Hadir Present
			Arif Suhartono	Hadir Present
15	Selasa, 12 Agustus 2025 Tuesday, August 12, 2025	• CEO Direction • Update Kajian *Roadmap* Transformasi Pelindo • Skema Integrasi JAI-PMS pada cluster MEPS • Desain Pengembangan Terminal Curah Kering Bengkulu • Joint Procurement Sewa Kendaraan Dinas Tahun 2025–2028 • Lain – lain • CEO Direction • Update on Pelindo Transformation Roadmap Study • JAI-PMS Integration Scheme in the MEPS Cluster • Bengkulu Dry Bulk Terminal Development Design • Joint Procurement for Official Vehicle Rentals for 2025–2028 • Miscellaneous	Arif Suhartono	Hadir Present
			Hambra	Hadir Present
			Boy Robyanto	Hadir Present
			Putut Sri Muljanto	Hadir Present
			Dwi Fatan Lilyana	Hadir Present
			Drajat Sulistyo	Hadir Present
			Arif Suhartono	Hadir Present

Tabel Rapat Direksi
Board of Directors Meetings

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Attendance
16	Selasa, 2 September 2025 Tuesday, September 2, 2025	• Pembahasan Surat Gubernur Bali (Lahan • untuk Pembangunan PSEL) • Pembahasan surat Gubernur Kalimantan Timur (Kerjasama Pengelolaan Terminal KKT) • *Update* Tindak Lanjut Aksi Korporasi di PT Airin • *Update* Hari Pelindo 2025 • Layout pengembangan Produk Terminal di Kalibaru • Lain – lain • Discussion of Bali Governor's Letter (Land for PSEL Development) • Discussion of East Kalimantan Governor's Letter (KKT Terminal Management Cooperation) • Update on Corporate Action Follow-up at PT Airin • Pelindo Day 2025 Update • Terminal Product Development Layout in Kalibaru • Miscellaneous	Arif Suhartono	Hadir Present
			Hambra	Hadir Present
			Boy Robyanto	Hadir Present
			Putut Sri Muljanto	Hadir Present
			Dwi Fatan Lilyana	Hadir Present
			Drajat Sulistyo	Hadir Present
			Arif Suhartono	Hadir Present
17	Rabu, 17 September 2025 Wednesday, September 17, 2025	• CEO Direction • Pembahasan Kondisi Kesejahteraan Pekerja • Penajaman dan Penyelarasan KPI Individu & KPI Perusahaan • Confidential (Tantiem / Insentif Khusus atas Kinerja Tahun 2024 Direksi *Subholding* dan • Anak Cucu Perusahaan di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) • Rencana Pengalihan Saham Pelindo pada PBM IHC kepada Danantara • Usulan RKAP Investasi 2026 Pelindo Grup • Rencana Pemilihan Mitra Benoa Cruise Terminal • Kinerja s.d. Agustus 2025 dan Usulan RKAP Tahun 2026 • CEO Direction • Discussion on Employee Welfare Conditions • Sharpening and Aligning Individual and Company KPIs • Confidential (Tantiem/Special Incentives for 2024 Performance of Subholding Directors and • Subsidiaries and Subsidiaries within PT Pelabuhan Indonesia (Persero) • Planned Transfer of Pelindo Shares in PBM IHC to Danantara • Proposed 2026 Investment Work Plan and Budget (RKAP) for Pelindo Group • Planned Partner Selection for Benoa Cruise Terminal • Performance as of August 2025 and Proposed 2026 RKAP	Arif Suhartono	Hadir Present
			Hambra	Hadir Present
			Boy Robyanto	Hadir Present
			Putut Sri Muljanto	Hadir Present
			Dwi Fatan Lilyana	Hadir Present
			Drajat Sulistyo	Hadir Present
			Arif Suhartono	Hadir Present

Tabel Rapat Direksi
Board of Directors Meetings

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Attendance
18	Selasa, 7 Oktober 2025 Tuesday, October 7, 2025	• CEO Direction • Confidential_Pembahasan Standarisasi Remunerasi Pelindo Group • Confidential_Pembahasan Harmonisasi Imbalan Paska Kerja PT Pelabuhan Indonesia (Persero) • Confidential_Finalisasi Struktur Organisasi Regional dan Cabang • Laporan Hasil Konsinyering RPP Bidang Pelayaran Dengan Kementerian Perhubungan • *Update* Progres Rencana Kerjasama Transshipment Hub Selat Malaka • *Update* Usulan RKAP 2026 dengan Template Danantara • Usulan Penetapan Kreditur Pendanaan Tahun 2025 dan Pelunasan Dipercepat Sebagian • Update Terkait Rencana Pengerukan Bengkulu s.d 12 m • Lain – lain • CEO Direction • Confidential_Discussion on Pelindo Group Remuneration Standardization • Confidential_Discussion on Harmonization of Post-Employment Benefits at PT Pelabuhan Indonesia (Persero) • Confidential_Finalization of Regional and Branch Organizational Structures • Report on the Results of the Draft Government Regulation on Shipping with the Ministry of Transportation • Progress Update on Malacca Strait Transshipment Hub Cooperation Plan • Update of the Proposed 2026 Work Plan and Budget (RKAP) with Danantara Template • Proposed Determination of 2025 Funding Creditors and Partial Accelerated Repayment • Update Regarding Bengkulu Dredging Plan of Up to 12 M • Miscellaneous	Arif Suhartono	Hadir Present
			Boy Robyanto	Hadir Present
			Putut Sri Muljanto	Hadir Present
			Dwi Fatan Lilyana	Hadir Present
			Drajat Sulistyo	Hadir Present
			Bachtiar Soeria Atmadja	Hadir Present
			Hosadi Apriza Putra	Hadir Present
			Muhammad Suriawan Wakan	Hadir Present
19	Selasa, 21 Oktober 2025 Tuesday, October 21, 2025	• CEO Direction • Rencana Pengerukan Alur Pelayaran Pontianak • Laporan Kinerja s.dTriwulan III – 2025 • Implementasi Aplikasi RCSA *Risk Control Self Assesment* (RCSA) Berbasis AI • *Update* Pengerukan Alur Pelayaran Pelabuhan Baai Bengkulu Regional 2 • Pembahasan Denda atas Sanksi Administratif SKKLH MNP • *Roadmap* Standarisasi Layanan Terminal Penumpang 2026-2028 • Lain – lain • CEO Direction • Pontianak Shipping Channel Dredging Plan • Performance Report until Quarter III, 2025 • Implementation of AI-Based RCSA Risk Control Self-Assessment (RCSA) Application • Update on Shipping Channel Dredging at Baai Port, Bengkulu, Region 2 • Discussion on Fines for Administrative Sanctions from the Ministry of Environment and Forestry (SKKLH) • Passenger Terminal Service Standardization Roadmap 2026-2028 • Other	Arif Suhartono	Hadir Present
			Boy Robyanto	Hadir Present
			Putut Sri Muljanto	Hadir Present
			Dwi Fatan Lilyana	Hadir Present
			Drajat Sulistyo	Hadir Present
			Bachtiar Soeria Atmadja	Hadir Present
			Hosadi Apriza Putra	Hadir Present
			Muhammad Suriawan Wakan	Hadir Present

Tabel Rapat Direksi
Board of Directors Meetings

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Attendance
20	Selasa, 11 November 2025 Tuesday, November 11, 2025	• CEO Direction • Konversi KJ dan Pelaksanaan evaluasi jabatan dan remunerasi (CONFIDENTIAL) • Tindak Lanjut Penyelesaian PMN Pengerukan Alur dan Kolam Pelabuhan Benca • Penyesuaian KPI Direksi secara Individual Tahun 2025 (dampak perubahan struktur organisasi) • *Progress Update* Laporan Persiapan Transaksi Pemilihan Mitra Kerjasama Pengoperasian dan Pengembangan Terminal Cruise di Pelabuhan Benoa PT Pelabuhan Indonesia (Persero) • Rencana Pengembangan Terminal Batang Sebagai Pelabuhan Pendukung Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) • Rencana Pengerukan Alur Pelabuhan Pontianak • Permohonan persetujuan penyesuaian usulan anggaran investasi 2026, investasi strategis HO, Penyesuaian Kebutuhan Dana dan Revisi Kewenangan pada Perdir Pedoman Investasi • Penyesuaian Implementasi Transfer Operatorship SPTP • Laporan legal review perubahan ke-4 UU BUMN • Lain-lain • CEO Direction • Conversion of KJ and Implementation of Job Evaluation and Remuneration (CONFIDENTIAL) • Follow-up on the Completion of PMN for Dredging the Benoa Port Channel and Basin • Adjustment of the Directors' Individual KPIs for 2025 (impact of organizational structure changes) • Progress Update Report on Preparation of Transaction for Selection of Cooperation Partners for the Operation and Development of Cruise Terminal at Benoa Port, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) • Development Plan for Batang Terminal as a Supporting Port for Batang Integrated Industrial Zone (KITB) • Plan for Dredging the Pontianak Port Channel • Request for approval for adjustments to the 2026 investment budget proposal, strategic investment for Port Authority (HO), Adjustment of Funding Requirements, and Revision of Authorities in the Investment Guidelines Regulation (Perdir) • Adjustment of the Implementation of SPTP Transfer Operatorship (SPTP) • Legal review report of the 4th Amendment to the State-Owned Enterprise Law • Miscellaneous	Arif Suhartono	Hadir Present
			Boy Robyanto	Tidak Hadir Absent
			Putut Sri Muljanto	Hadir Present
			Dwi Fatan Lilyana	Hadir Present
			Drajat Sulistyo	Hadir Present
			Bachtiar Soeria Atmadja	Hadir Present
			Hosadi Apriza Putra	Hadir Present
			Muhammad Suriawan Wakan	Hadir Present

Tabel Rapat Direksi
Board of Directors Meetings

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Attendance
21	Selasa, 2 Desember 2025 Tuesday, December 2, 2025	• Validasi RJPP 2026-2030 yang akan disubmit ke PT DAM (Persero) • Penyampaian Laporan Final Hasil Kajian Pre Study Rencana Kerjasama Dengan Mitra Strategis untuk *Container* Terminal 2 dan Container Terminal 3 (CT2 & CT3) Di Tanjung Priok dan Makassar *New Port* Setelah Reviu Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Jaksa Pengacara Negara (JPN) • Pemberlakuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pengawasan Kegiatan Bongkar Muat Barang di Pelabuhan sebesar 1% • Usulan Kebijakan Rewards Kepada Pelanggan Atas Jasa Pelayanan Kapal • Usulan Pola Penataan Komersialisasi SPMT • Group • Lain-lain • Validation of the 2026-2030 Long-Term Development Plan (RJPP) to be submitted to PT DAM (Persero) • Submission of the Final Report on Pre-Study Results of the Collaboration Plan with Strategic Partners for Container Terminal 2 and Container Terminal 3 (CT2 & CT3) at Tanjung Priok and Makassar New Port after a Review by the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) and the State Attorney General (JPN) • Implementation of a 1% Non-Tax State Revenue (PNBP) for Supervision of Loading and Unloading Activities at the Port • Proposed Rewards Policy for Customers for Ship Services • Proposed SPMT Commercialization Arrangement Pattern • Group • Others	Arif Suhartono	Hadir
			Boy Robyanto	Tidak Hadir
			Putut Sri Muljanto	Hadir
			Dwi Fatan Lilyana	Hadir
			Drajat Sulistyo	Hadir
			Bachtiar Soeria Atmadja	Hadir
			Hosadi Apriza Putra	Hadir
			Muhammad Suriawan Wakan	Hadir

Tabel Rapat Direksi
Board of Directors Meetings

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Attendance
22	Selasa, 16 Desember 2025 Tuesday, December 16, 2025	• CEO Direction • Paparan Kinerja s.d November 2025 • Pembahasan Persetujuan Draft RFP (Request for Proposal) Pemilihan Mitra Terminal Cruise Benoa • Pembahasan Persetujuan KPI Direksi Tahun 2026 • Pembahasan Pedoman Manajemen Talenta dan Karier Pekerja • Pembahasan Rencana Pelaksanaan Kenaikan Kelas Jabatan Pekerja • Pembahasan Rencana Penanganan • Kebocoran Tanggul Kawasan Muara Baru dan Kawasan Pelabuhan Indonesia Sunda Kelapa • Update Pekerjaan Pengerukan Bengkulu-12 ml.WS • Laporan perkembangan penanganan case dugaan kapal tunda dumai • Update Pengembangan Terminal Curah Kering Bengkulu • Rencana Kerjasama Handling Batubara Di Pelabuhan Panjang • Lain-lain • CEO Direction • Performance Report until November 2025 • Discussion on Approval of the Draft RFP (Request for Proposal) for the Selection of Benoa Cruise Terminal Partners • Discussion on Approval of the Board of Directors' KPIs for 2026 • Discussion on Employee Talent and Career Management Guidelines • Discussion on the Employee Promotion Implementation Plan • Discussion on the Handling Plan • Leakage in Muara Baru and Sunda Kelapa Ports Areas • Update on Dredging Work in Bengkulu-12 ml.WS • Progress Report on the Handling of Suspected Dumai Tugboat Case • Update on the Development of Bengkulu Dry Bulk Terminal • Coal Handling Cooperation Plan at Panjang Port • Miscellaneous	Arif Suhartono Boy Robyanto Putut Sri Muljanto Dwi Fatan Lilyana Drajat Sulistyo Bachtiar Soeria Atmadja Hosadi Apriza Putra Muhammad Suriawan Wakan	Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir

Agenda dan peserta rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi telah tersaji pada bagian Rapat Dewan Komisaris Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan tahunan ini.

The agenda and participants of joint meeting of Board of Commissioners and Board of Directors have been presented in the Board of Commissioners Meeting section of the Corporate Governance Chapter in this Annual Report.

FREKUENSI DAN KEHADIRAN RAPAT DIREKSI

FREQUENCY AND ATTENDANCE OF BOARD OF DIRECTORS MEETINGS

Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat Direksi
Frequency and Attendance of Board of Directors Meetings

Nama Name	**Jabatan** Position	**Rapat Direksi** Board of Directors Meeting		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran Number and Percentage of Attendance		
		Jumlah Rapat Number of Meetings	**Jumlah Kehadiran** Number of Attendance	**Persentase** Percentage
Arif Suhartono	Direktur Utama President Director	22	22	100%
Hambra*	Wakil Direktur Utama Deputy President Director	17	16	94%
Mega Satria*	Direktur Keuangan Director of Finance	18	18	100%
Ihsanuddin Usman**	Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Director of Human Capital and General Affairs	10	10	100%
Prasetyo**	Direktur Strategi Director of Strategy	12	12	100%
Boy Robyanto	Direktur Manajemen Risiko Director of Risk Management	22	20	90%
Putut Sri Muljanto	Direktur Operasi Director of Operations	22	22	100%
Dwi Fatan Lilyana***	Direktur SDM dan Umum Human Resources and General Affairs Director	10	10	100%
Drajat Sulistyo***	Direktur Komersial Director of Commerce	10	10	100%
Bachtiar Soeria Atmadja****	Direktur Keuangan Director of Finance	5	5	100%
Hosadi Apriza Putra****	Direktur Pengembangan Usaha Director of Business Development	0	0	-
Muhammad Suriawan Wakan****	Direktur Teknik Director of Engineering	5	5	100%

*Sehubungan dengan telah diangkat sebagai Direktur Keuangan PT Pertamina Patra Niaga pada tanggal 4 Juli 2025 maka dikukuhkan pemberhentian yang bersangkutan pada tanggal 19 September 2025.
**Berhenti menjabat sejak tanggal 25 Juni 2025
***Mulai menjabat sejak tanggal 25 Juni 2025
****Mulai menjabat sejak tanggal 19 September 2025
*Following the appointment as Finance Director of PT Pertamina Patra Niaga on July 4, 2025, the formal dismissal of was confirmed on September 19, 2025
**Ceased to hold office as of June 25, 2025
***Assumed office as of June 25, 2025
****Assumed office as of September 19, 2025

Rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris Joint Meeting of Board of Directors and Board of Commissioners			RUPS GMS		
Jumlah dan Persentase Kehadiran Number and Percentage of Attendance			Jumlah dan Persentase Kehadiran Number and Percentage of Attendance		
Jumlah Rapat Number of Meetings	**Jumlah Kehadiran** Number of Attendance	**Persentase** Percentage	**Jumlah Rapat** Number of Meetings	**Jumlah Kehadiran** Number of Attendance	**Persentase** Percentage
12	12	100%	2	2	100%
8	8	100%	2	2	100%
5	5	100%	2	2	100%
4	4	100%	2	2	100%
6	6	100%	2	2	100%
12	12	100%	2	2	100%
12	12	100%	2	2	100%
6	6	100%	0	0	-
6	6	100%	0	0	-
4	4	100%	0	0	-
0	0	-	0	0	-
4	4	100%	0	0	-

PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI ANGGOTA DIREKSI

Peningkatan kapabilitas dinilai penting agar Direksi dapat selalu memperbaharui informasi tentang perkembangan terkini dari *core business* Perseroan, mengantisipasi masalah yang timbul di kemudian hari bagi keberlangsungan dan kemajuan Perseroan. Ketentuan-ketentuan tentang program peningkatan kapabilitas bagi Direksi adalah sebagai berikut:

1. Program peningkatan kapabilitas dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja Direksi;
2. Rencana untuk melaksanakan program peningkatan kapabilitas harus dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
3. Setiap tahun masing-masing anggota Direksi wajib mengikuti salah satu pelatihan dengan topik manajemen risiko, fraud, bisnis, kegiatan usaha korporasi, hukum, kepatuhan, keuangan, akuntansi, audit, kegiatan korporasi signifikan BUMN dan/atau sesuai dengan bidang tugas masing-masing Direksi;
4. Dalam satu tahun Direksi wajib mengikuti pelatihan paling sedikit berjumlah 40 (empat puluh) jam pelatihan;
5. Pelatihan yang diikuti merupakan program pelatihan berkelanjutan PPL yang diselenggarakan oleh lembaga profesi, regulator, lembaga pelatihan yang terakreditasi oleh lembaga akreditasi dan/atau lembaga pelatihan yang dimiliki atau dikendalikan oleh BUMN;
6. Direksi wajib mengikuti paling sedikit 1 (satu) sertifikasi antara lain bidang bisnis, kegiatan usaha korporasi, hukum, manajemen risiko, kepatuhan, keuangan, akuntansi, dan/atau sesuai dengan bidang tugas masing-masing Direksi;
7. Sertifikasi diterbitkan oleh dewan sertifikasi/regulator/organisasi profesi terkait yang diakusi secara nasional dan/atau internasional, sertifikasi memiliki standar profesi dan etika, sertifikasi diwajibkan selama masa jabatan;
8. Anggota Direksi yang bersangkutan harus bertanggungjawab untuk membuat laporan tentang pelaksanaan program peningkatan kapabilitas. Laporan tersebut disampaikan kepada Direksi, selambat nya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penyelenggaraan pelaksanaan program tersebut;
9. Direktur yang membidangi pengelolaan keuangan dan Direktur yang membidangi pengelolaan risiko memiliki kualifikasi dan sertifikasi tersendiri sesuai dengan Petunjuk teknis komposisi dan kualifikasi organ pengelolaan risiko di lingkungan BUMN.

Adapun pelatihan yang telah diikuti oleh Direksi selama tahun 2025, yaitu:

BOARD OF DIRECTORS TRAINING AND/OR COMPETENCY DEVELOPMENT

Capability improvement is deemed important to enable Board of Directors to update their knowledge on the latest developments of the Company's core business, to anticipate problems that arise in the future for the Company's sustainability and progress. The provisions regarding Board of Directors capability improvement program are as follows:

1. The capability improvement program is carried out to improve the work effectiveness of Board of Directors;
2. The capability improvement program plan must be included in the RKAP;
3. Each year, each member of Board of Directors is required to attend one training on the topic of risk management, fraud, business, corporate business activities, law, compliance, finance, accounting, auditing, significant corporate activities of SOEs and/or in accordance with the field of duties of each Board of Directors;
4. In one year, Board of Directors must attend at least 40 (forty) hours of training;
5. The training attended is a PPL continuous training programme organised by professional institutions, regulators, training institutions accredited by accreditation institutions and/or training institutions owned or controlled by SOEs;
6. Board of Directors must follow at least 1 (one) certification, among others, in the fields of business, corporate business activities, law, risk management, compliance, finance, accounting, and/or in accordance with the field of duties of each Board of Directors;
7. Certification is issued by a certification board/regulator/relevant professional organisation that is accredited nationally and/or internationally, certification has professional and ethical standards, certification is required during the tenure;
8. The member of Board of Directors concerned shall be responsible for making a report on the implementation of capability development program. The report shall be submitted to the Board of Directors, no later than 30 (thirty) days after the date of program implementation;
9. Director in charge of financial management and Director in charge of risk management have their own qualifications and certifications in accordance with the technical guidelines for the composition and qualifications of risk management organs within SOEs.

The trainings that have been attended by Board of Directors during 2025 are:

Nama Time	Jabatan Position	Materi Pelatihan Training Materials	Waktu Time	Penyelenggara Organizer
Arif Suhartono	Direktur Utama President Director	CAFG (*Certified Anti Fraud Governance*)	18 - 19 September 2025 September 18-19, 2025	PT GRC Management
		Awarness Sistem Manajemen Terpadu Integrated Management System Awareness	27 November 2025 November 27, 2025	PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia
		Master Class: Risk Governance	3 Desember 2025 December 3, 2025	Enterprise Risk Management Academy
		Efektivitas *Business Judgement Rule* (BJR) dalam memberikan Perlindungan Hukum kepada Pimpinan Perusahaan BUMN dalam Menjalankan Kegiatan Operasional Perusahaan The Effectiveness of Business Judgment Rule (BJR) in Providing Legal Protection to State-Owned Enterprise (SOE) Leaders in Carrying Out Company Operations	12 Desember 2025 December 12, 2025	Governance Academy
Hambra*	Wakil Direktur Utama Vice President Director	-	-	-
Mega Satria*	Direktur Keuangan Finance Director	-	-	-
Ihsanuddin Usman**	Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Director of Human Capital and General Affairs	-	-	-
Prasetyo**	Direktur Strategi Director of Strategy	-	-	-
Boy Robyanto	Direktur Manajemen Risiko Directof of Risk Management	CAFG (Certified Anti Fraud Governance)	18 - 19 September 2025 September 18 – 19, 2025	PT GRC Management
		Imperial Innovation: A Design Thinking Approach Programme	10 – 14 November 2025 November 10-14, 2025	Imperial College
Putut Sri Muljanto	Direktur Operasi Director of Operations	CAFG (Certified Anti Fraud Governance)	18 sd 19 September 2025 September 18 – 19, 2025	PT GRC Management
		Pendidikan Profesi Berkelanjutan: Accounting and Business Leadership Forum Penerapan Standar Pengungkapan Keberlanjutan (SPK) PSPK 1 dan PSPK 2 dalam Praktik Pelaporan ESG Continuing Professional Education: Accounting and Business Leadership Forum Implementation of Sustainability Disclosure Standards (DSS) PSPK 1 and PSPK 2 in ESG Reporting Practices	26 – 27 September 2025 September 26-27, 2025	Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jawa Timur
		Master Class: Risk Governance	3 Desember 2025 December 3, 2025	Enterprise Risk Management Academy

Nama Time	**Jabatan** Position	**Materi Pelatihan** Training Materials	**Waktu** Time	**Penyelenggara** Organizer
Dwi Fatan Lilyana***	Direktur SDM dan Umum Human Resources and General Affairs Director	IAF Asia Conference 2025	3 - 4 September 2025 September 3-4, 2025	IAF Indonesia
		Demystifing AI in Healthcare	23 – 26 Juni 2025 June 23-26, 2025	The University of British Columbia
Drajat Sulistyo***	Direktur Komersial Director of Commerce	CAFG (Certified Anti Fraud Governance)	18 - 19 September 2025 September 18-19, 2025	PT GRC Management
		Awarness Sistem Manajemen Terpadu Integrated Management System Awareness	27 November 2025 November 27, 2025	PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia
		Master Class: Risk Governance	3 Desember 2025 December 3, 2025	Enterprise Risk Management Academy
		Navigating Strategic Risk in Decision Making Process	12 – 13 Desember 2025 December 12-13, 2025	CRMS
Bachtiar Soeria Atmadja****	Direktur Keuangan Director of Finance	Corporate Law of Executive: Aspek hukum dalam Pengelolaan Korporasi BUMN Corporate Law of Executives: Legal Aspects in the Management of State-Owned Enterprises	15 -16 Mei 2025 May 15-16, 2025	The Indonesia Capital Market Institute
		Master Class: Risk Governance	3 Desember 2025 December 3, 2025	Enterprise Risk Management Academy
		Awarness Sistem Manajemen Terpadu Integrated Management System Awareness	27 November 2025 November 27, 2025	PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia
		Efektivitas Business Judgement Rule (BJR) dalam memberikan Perlindungan Hukum kepada Pimpinan Perusahaan BUMN dalam Menjalankan Kegiatan Operasional Perusahaan The Effectiveness of Business Judgment Rule (BJR) in Providing Legal Protection to State-Owned Enterprise (SOE) Leaders in Carrying Out Company Operations	12 Desember 2025 December 12, 2025	Governance Academy
Hosadi Apriza Putra****	Direktur Pengembangan Usaha Director of Business Development	-	-	-

Nama Time	Jabatan Position	Materi Pelatihan Training Materials	Waktu Time	Penyelenggara Organizer
		Investment Strategies and Portofolio Management	24 -25 November 2025 November 24-25, 2025	The Indonesia Capital Market Institute
		Master Class: Risk Governance	3 Desember 2025 December 3, 2025	Enterprise Risk Management Academy
		Navigating Strategic Risk in Decision Making Process	12 – 13 Desember 2025 December 12-13, 2025	CRMS
Muhammad Suriawan Wakan****	Direktur Teknik Director of Engineering	Efektivitas Business Judgement Rule (BJR) dalam memberikan Perlindungan Hukum kepada Pimpinan Perusahaan BUMN dalam Menjalankan Kegiatan Operasional Perusahaan The Effectiveness of Business Judgment Rule (BJR) in Providing Legal Protection to State-Owned Enterprise (SOE) Leaders in Carrying Out Company Operations	12 Desember 2025 December 12, 2025	Governance Academy

**Sehubungan dengan telah diangkat sebagai Direktur Keuangan PT Pertamina Patra Niaga pada tanggal 4 Juli 2025 maka dikukuhkan pemberhentian yang bersangkutan pada tanggal 19 September 2025.
**Berhenti menjabat sejak tanggal 25 Juni 2025
***Mulai menjabat sejak tanggal 25 Juni 2025
****Mulai menjabat sejak tanggal 19 September 2025
*Following the appointment as Finance Director of PT Pertamina Patra Niaga on July 4, 2025, the formal dismissal of was confirmed on September 19, 2025.**Ceased to hold office as of June 25, 2025
***Assumed office as of June 25, 2025
****Assumed office as of September 19, 2025

PROGRAM ORIENTASI BAGI DIREKSI BARU

Ketentuan tentang program pengenalan bagi anggota Direksi adalah sebagai berikut:

1. Kepada anggota Direksi yang diangkat untuk pertama kalinya, wajib diberikan program pengenalan mengenai Perseroan.
2. Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada pada Sekretaris Perusahaan atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Perusahaan.
3. Program pengenalan meliputi:
   a. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perseroan;
   b. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko, dan masalah-masalah strategis lainnya;
   c. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit; dan
   d. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal-hal lain yang tidak diperbolehkan.
4. Program pengenalan Perusahaan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke fasilitas Perusahaan dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan Perusahaan.

ORIENTATION PROGRAM FOR NEW BOARD OF DIRECTORS

The provisions regarding the orientation program for members of Board of Directors are as follows:

1. Members of Board of Directors who are appointed for the first time must be given an orientation program regarding the Company.
2. The responsibility for conducting the orientation program rests with the Corporate Secretary or anyone who performs the function as the Corporate Secretary.
3. The orientation program includes:
   a. Implementation of GCG principles by the Company;
   b. An overview of the Company in relation to the objectives, nature and scope of activities, financial and operating performance, strategies, short-term and long-term business plans, competitive position, risks, and other strategic issues;
   c. Information related to delegated authority, internal and external audit, internal control systems and policies, including the Audit Committee; and
   d. Information regarding the duties and responsibilities of Board of Commissioners and Board of Directors as well as other prohibited matters.
4. The Company's orientation program can be in the form of presentations, meetings, visits to Company facilities and review of documents or other programs deemed appropriate to the Company.

5. Program pengenalan Perusahaan dilaksanakan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah RUPS memutuskan pengangkatan anggota Direksi yang baru.

Program orientasi bagi Direksi yang baru diangkat pada tahun 2025 dilaksanakan melalui rapat antara Direksi baru dengan GH Sekretariat Perusahaan untuk memaparkan informasi terkait perusahaan yang diselesanggaran pada tanggal 27 Juni 2025 dan 22 September 2025.

KEPUTUSAN DAN PELAKSANAAN TUGAS DIREKSI

Selama tahun 2025, Direksi telah mengeluarkan 80 keputusan dalam rapat Direksi untuk menunjang kegiatan Perseroan. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, selama tahun 2025 Direksi telah menjalankan tugasnya untuk pengurusan Perseroan. Adapun tugas yang telah dilakukan oleh Direksi antara lain:

1. Menyusun Laporan Tahunan 2024.
2. Menggelar rapat Direksi yang pada tahun 2025
3. Menyusun RKAP termasuk strategi Perseroan dan RKM Perseroan Tahun 2025
4. Menyusun Laporan Manajemen triwulanan dan tahunan termasuk pelaksanaan strategi Perseroan
5. Membuat Pakta Integritas dalam rangka penerapan GCG, Kepatuhan Kode Etik Bisnis, Surat Pernyataan Benturan Kepentingan, Daftar Khusus Kepemilikan Saham
6. Menghadiri rapat Dewan Komisaris mengundang Direksi
7. Melakukan kunjungan kerja ke Cabang Pelabuhan dan Anak Perusahaan
8. Melakukan Pelindo Forum yang dihadiri oleh seluruh BOD BOC Subholding, Jajaran Fungsional ANak Perusahaan, Cucu Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi.
9. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham terkait Pengesahan RKAP 2025 dan Rapat Umum Pemegang Saham Laporan Tahunan
10. Melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam berbagai bidang mencakup bisnis, operasional dan support.
11. Memastikan Penerapan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha
12. Mengatur ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk gaji, pensiun, promosi, pelatihan, jaminan hari tua, jaminan kesehatan, dan lainnya.
13. Melaksanakan kegiatan CSR, selama tahun 2025 telah tersalur dana CSR untuk kegiatan sosial kemasyarakatan maupun lingkungan.
14. Pelaksanaan tugas lainnya terkait pengurusan Perseroan
15. Menetapkan kebijakan lainnya untuk Perusahaan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan

5. The Company's orientation program is carried out no later than 90 (ninety) calendar days after the GMS decides on the appointment of new members of Board of Directors.

The orientation program for newly appointed Directors in 2025 was carried out through a meeting between the new Directors and the GH Corporate Secretariat to present information related to the company which was held on June 27, 2025 and September 22, 2025.

BOARD OF DIRECTORS' DECISIONS AND IMPLEMENTATION OF DUTIES

During 2025, Board of Directors has issued 80 Decisions to support the Company's activities.In accordance with its duties and responsibilities, during 2025 the Board of Directors has carried out its duties in managing the Company as follow:

1. Prepare the 2024 Annual Report.
2. Hold Board of Directors meeting in 2025.
3. Prepare the Company's Work Plan and Budget (RKAP), including the Company's strategy and Work Plan and Budget (RKM) for 2025.
4. Prepare quarterly and annual Management Reports, including the implementation of the Company's strategy.
5. Create an Integrity Pact for the implementation of GCG, compliance with the Code of Conduct, a Conflict of Interest Statement, and a Special List of Share Ownership.
6. Attend Board of Commissioners meetings inviting the Board of Directors.
7. Conduct working visits to Port Branches and Subsidiaries.
8. Conduct Pelindo Forum attended by all BODs, BOCs, Subsidiaries, and Affiliated Companies.
9. Hold a General Meeting of Shareholders for the Ratification of 2025 RKAP and a General Meeting of Shareholders for the Annual Report.
10. Collaborate with third parties in various areas, including business, operations, and support.
11. Ensure the implementation of Good Corporate Governance in all business activities.
12. Regulate provisions regarding the Company's employees, including salaries, pensions, promotions, training, old-age security, health insurance, and other matters.
13. Carry out CSR activities. Through 2025, CSR funds have been distributed for social and environmental activities.
14. Execute other duties related to the management of the Company.
15. Establish other policies for the Company in accordance with statutory provisions.

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DIREKSI DAN DASAR PENILAIANNYA

Dalam melaksanakan tugas kepengurusannya, Direksi dibantu oleh 2 (dua) Komite di bawah Direksi, yang terdiri dari Komite Pelindo Bersih dan Komite Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan. Prosedur penilaian kinerja Komite di bawah Direksi dilakukan oleh Direksi secara periodik dengan kriteria penilaian kinerja Komite di bawah Direksi berdasarkan rapat dan pelaksanaan tugas yang telah dijalankan selama tahun buku.

Komite Pelindo Bersih merupakan komite yang membantu Direksi dalam Melakukan pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan WBS Perseroan serta menyelesaikan laporan WBS yang telah masuk. Selama tahun 2025, Komite Pelindo Bersih telah melaksanakan rapat sebanyak 2 (Dua) kali. Selama periode tahun 2025, telah terdapat 828 laporan dimana 21 laporan termasuk dalam indikasi pelanggaran dengan progress tindak lanjut 81%. Disamping itu, masih tedapat 2 laporan yang merupakan laporan indikasi pelanggaran dari tahun sebelumnya. Seluruh laporan yang masuk telah ditindaklanjut dan dilaporkan kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi. Selain itu komite pelindo bersih juga telah melakukan kegiatan sosialisasi baik kepada internal dan eksternal dengan kegiatan tatap muka, artikel dan infografis. Tahun ini, Komite Pelindo bersih telah melakukan pembaharuan system saluran website pelindo bersih, sistem baru ini mempunyai beberapa keunggulan diantaranya adalah terintegrasi dengan KPK RI, terstandart ISO 37002:2021 dan identitas pelapor anonymous.

Komite Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan merupakan organ pendukung Direksi yang berkedudukan di Kantor Pusat Perusahaan dan berperan dalam memberikan pertimbangan terkait aspek tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan dalam penentuan serta pelaksanaan kebijakan Perusahaan. Peran tersebut mencakup pengelolaan investasi, kebijakan strategis operasional, serta pengendalian kegiatan strategis usaha di lingkungan Grup Pelindo. Komite melaksanakan tugasnya secara kolektif dalam membantu Direksi, termasuk melakukan penelaahan atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen terkait tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan, serta memberikan opini atas usulan program investasi dan kebijakan strategis operasional Perusahaan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Komite melakukan identifikasi terhadap hal-hal yang memerlukan perhatian Direksi sebelum penetapan keputusan strategis, serta pembahasan atas aksi korporasi dan proyek strategis yang memenuhi kriteria tertentu. Selama tahun 2025, Komite telah melaksanakan rapat sebanyak 4 (empat) kali sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi tersebut.

PERFORMANCE APPRAISAL OF COMMITTEES UNDER BOARD OF DIRECTORS AND THE BASIS OF APPRAISAL

In carrying out its management duties, Board of Directors is supported by 2 (two) Committees under the Board of Directors, namely Pelindo Bersih Committee and Governance, Risk Management, and Compliance Committee. The performance appraisal procedure for these Committees is conducted periodically by the Board of Directors, based on performance criteria that consider committee meetings and the execution of duties performed throughout the fiscal year.

Pelindo Bersih Committee is a committee that assists the Board of Directors in supervising the effectiveness of the Company's Whistleblowing System (WBS) implementation and in resolving incoming WBS reports. During 2025, Pelindo Bersih Committee held 2 (two) meetings. Throughout 2025, a total of 828 reports were received, of which 21 reports were identified as potential violations with a follow-up progress rate of 81%. In addition, there were still 2 reports carried over from the previous year that were also categorized as potential violations. All incoming reports have been followed up and reported to the Shareholders, Board of Commissioners, and Board of Directors. Pelindo Bersih Committee also carried out socialization activities for both internal and external stakeholders through face-to-face sessions, articles, and infographics. This year, the Committee upgraded Pelindo Bersih website reporting system. The new system has several advantages, including integration with the Indonesian Corruption Eradication Commission (KPK RI), compliance with ISO 37002:2021 standards, and anonymous reporter identity protection.

Governance, Risk Management, and Compliance Committee is a supporting organ of the Board of Directors based at the Company's Head Office and plays a role in providing recommendations on governance, risk management, and compliance aspects in determining and implementing Company policies. Its scope includes investment management, strategic operational policies, and control of strategic business activities within Pelindo Group. The Committee performs its duties collectively in supporting the Board of Directors, including reviewing the completeness and conformity of governance, risk management, and compliance documents, as well as providing opinions on proposed investment programs and strategic operational policies in accordance with applicable laws and regulations. In addition, the Committee identifies matters requiring the attention of the Board of Directors prior to strategic decision-making and discusses corporate actions and strategic projects that meet certain criteria. During 2025, the Committee held 4 (four) meetings as part of its function.

Sepanjang tahun 2025, Direksi menilai bahwa Komite di bawah Direksi tersebut telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, serta sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan pada Surat Keputusan Direksi.

MEKANISME PENGUNDURAN DIRI DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI

Pengunduran Diri Anggota Direksi

1. Seorang Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perusahaan dengan tembusan kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Apabila dalam surat pengunduran diri disebutkan tanggal efektif kurang dari 30 (tiga puluh) hari dari tanggal surat diterima, maka dianggap tidak menyebutkan tanggal efektif pengunduran diri;
2. Apabila sampai dengan tanggal yang diminta oleh anggota Direksi yang bersangkutan atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri dalam hal tidak disebutkan tanggal efektif pengunduran diri, tidak ada keputusan dari RUPS, maka anggota Direksi tersebut berhenti pada tanggal yang diminta tersebut di atas atau dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri diterima tanpa memerlukan persetujuan RUPS;
3. Pengunduran diri anggota Direksi dapat kurang dari 30 (tiga puluh) hari, apabila secara peraturan perundangan tidak memperbolehkan yang bersangkutan rangkap jabatan.

Pemberhentian Anggota Direksi

1. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya;
2. RUPS melakukan evaluasi sebelum melakukan pemberhentian anggota Direksi;
3. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Poin a di atas, dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Direksi yang bersangkutan antara lain:
   a. Tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam Kontrak Manajemen tahunan Direksi;
   b. Adanya perubahan strategi binis pada perusahaan;
   c. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
   d. Tidak melaksanakan dan atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;
   e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan dan/atau Negara;
   f. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Direksi BUMN;
   g. Telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa oleh pihak yang berwenang dalam tindakan yang merugikan Perusahaan dan/atau keuangan Negara;
   h. Melakukan tindakan yang melanggar kode etik Direksi BUMN;

Throughout 2025, the Board of Directors assessed that both Committees under its supervision have performed their duties and responsibilities properly, in accordance with the assigned mandates as stipulated in the Board of Directors' Decrees.

BOARD OF DIRECTORS RESIGNATION AND DISMISSAL MECHANISM

Member of Board of Directors Resignation

1. A Member of Board of Directors is entitled to resign from his/her position by notifying in writing of his/her intention to the Company with a copy to the Shareholders, Board of Commissioners and other members of Board of Directors at the latest 30 (thirty) days before the date of his/her resignation. If the resignation letter states an effective date of less than 30 (thirty) days from the date of letter received, it shall be deemed not to mention the effective date of resignation;
2. If until the date requested by the member of Board of Directors concerned or within 30 (thirty) days from the date of request for resignation letter in the event that the effective date of resignation is not stated, there is no resolution from the GMS, then member of Board of Directors shall cease to exist on the date requested above or with the lapse of 30 (thirty) days from the date the request for resignation letter is received without requiring the GMS approval;
3. The resignation of a member of Board of Directors may be less than 30 (thirty) days, if the laws and regulations do not allow the person concerned to hold concurrent positions.

Board of Directors Member Dismissal

1. The GMS may dismiss the members of Board of Directors at any time by stating the reasons;
2. The GMS shall conduct an evaluation before dismissing a member of Board of Directors;
3. The reason for the dismissal of a member of Board of Directors as referred to in Point a above, is carried out if based on reality, the member of Board of Directors concerned, among others:
   a. Unable to fulfil his/her obligations that have been agreed upon in the annual Management Contract of Board of Directors;
   b. There is a change in business strategy in the Company;
   c. Unable to perform his/her duties properly;
   d. Not implementing and/or violating the provisions of laws and regulations and/or Articles of Association;
   e. Involved in actions that are detrimental to the Company and/or the State;
   f. Conducting actions that violate ethics and/or propriety that should be respected as a member of Board of Directors of SOEs;
   g. Has been named as a suspect or defendant by the competent authority in an action that is detrimental to the Company and/or State finances;
   h. Has committed an act that violates the code of conduct of SOE Board of Directors;

i. Dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
j. Berhalangan tetap, termasuk sakit keras/sakit, berkepanjangan
k. Mengundurkan diri.

4. Di samping alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada bagian 1) sampai dengan 11) di atas, Direksi dapat diberhentikan oleh RUPS berdasarkan alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perusahaan;
5. Di samping alasan pemberhentian anggota Direksi dimaksud pada bagian 10 sampai dengan 11 dan point c di atas, pemberhentian Direksi memperhatikan alasan pemberhentian sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perusahaan;
6. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada Poin b bagian dan Poin c di atas diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

TUGAS DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan Perusahaan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan RJPP, RKAP, keputusan RKAP, ketentuan dan kepatuhan peraturan perusahaan terhadap Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap penerapan manajemen risiko, pelaksanaan fungsi pengawasan intern serta Tata Kelola terintegrasi.

WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Dewan Komisaris berwenang untuk:

1. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen Perusahaan, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain, memeriksa surat berharga serta kekayaan Perusahaan;
2. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan;
3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan;
4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;

i. Declared guilty by a court decision that has permanent legal force;
j. Permanently unable to perform his/her duties, including prolonged illness.
k. Resignation.

4. In addition to the reasons for dismissal of members of Board of Directors as referred to in sections 1) to 11) above, Board of Directors may be dismissed by GMS based on other reasons deemed appropriate by GMS for the interests and objectives of the Company;
5. In addition to the dismissal reasons for members of Board of Directors referred to in section 10 to 11 and point c above, the dismissal of Board of Directors shall pay attention to the reasons for dismissal as stipulated in the Company's articles of association;
6. The dismissal decision as referred to in Point b section and Point c above is taken after the person concerned is given the opportunity to defend himself.

BOARD OF COMMISSIONERS

Board of Commissioners is a corporate organ whose task is to supervise and provide advice to the Board of Directors in carrying out the Company's management activities.

BOARD OF COMMISSIONERS DUTIES AND AUTHORITIES

BOARD OF COMMISSIONERS DUTIES

Board of Commissioners is tasked with supervising the Company's management policies, the general management of both the Company and the Company's business carried out by the Board of Directors and providing advice to the Board of Directors, including supervising the implementation of RJPP, RKAP and Articles of Association and GMS resolutions, as well as prevailing laws and regulations, for the benefit of the Company and in accordance with the purposes and objectives of the Company. Board of Commissioners supervises the implementation of risk management, internal control function and Integrated Governance.

BOARD OF COMMISSIONERS AUTHORITIES

In carrying out its supervisory duties, Board of Commissioners has the authority to:

1. Look at the Company's books, letters and documents, examine cash for verification purposes and others, examine the Company's securities and assets;
2. Entering the grounds, buildings and offices used by the Company;
3. Request an explanation from the Board of Directors nd/or other officials regarding all issues related to the management of the Company;
4. Acknowledge all policies and actions that have been and will be carried out by the Board of Directors;

5. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;
6. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap perlu;
7. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
8. Membentuk Komite-Komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan;
9. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perusahaan, jika dianggap perlu;
10. Melakukan tindakan pengurusan Perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
11. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
12. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.

TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

1. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris bertanggungjawab kepada RUPS;
2. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
3. Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana point 2 di atas, dilakukan untuk kepentingan Perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu;
4. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional perusahaan kecuali ditetapkan dalam Anggaran Dasar atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pengambilan keputusan kegiatan operasional perusahaan oleh Dewan Komisaris pada point 4 di atas merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan perusahaan;
6. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi;
7. Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perusahaan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Angka 3 di atas;
8. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada point 4 berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.

5. Requesting the Board of Directors and/or other officials under the Directors, under their consent, to attend the Board of Commissioners meetings;
6. Appoint and dismiss the Secretary of Board of Commissioners, if deemed necessary;
7. Temporarily dismiss members of Board of Directors in accordance with the Articles of Association;
8. Temporarily dismiss members of Board of Directors in accordance with the Articles of Association;
9. Using experts for certain matters and within a certain period of time at the expense of the Company, if deemed necessary;
10. Carry out management actions of the Company under certain conditions for a certain period of time in accordance with the Articles of Association;
11. Attend Board of Directors meetings and provide views on matters discussed;
12. Carry out other supervisory authorities as long as they do not conflict with laws and regulations, the Articles of Association, and/or GMS resolutions.

BOARD OF COMMISSIONERS RESPONSIBILITIES

1. In carrying out its duties, Board of Commissioners is accountable to the GMS;
2. Board of Commissioners supervises management policies, general management of both the Company and the Company's business, and provides advice to the Board of Directors;
3. Supervision and provision of advice as point 2 above, is carried out for the benefit of the Company and is not intended for the benefit of certain parties or groups;
4. In carrying out supervision, Board of Commissioners is prohibited from participating in decision making of the Company's operational activities unless stipulated in the Articles of Association or provisions of laws and regulations;
5. Decision making of the Company's operational activities by the Board of Commissioners in point 4 above is part of supervisory duties by the Board of Commissioners so as not to negate the responsibility of Board of Directors for the implementation of the Company's management;
6. Each member of Board of Commissioners shall exercise good faith, prudence, and responsibility in carrying out supervisory and advisory duties to the Board of Directors;
7. Each member of Board of Commissioners shall be personally liable for the Company's losses if he/she is guilty or negligent in performing his/her duties as referred to in Number 3 above;
8. In the event that the Board of Commissioners consists of 2 (two) or more members of Board of Commissioners, the responsibility as referred to in point 4 shall apply jointly and severally to each member of Board of Commissioners.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMISARIS UTAMA

1. Bertanggung jawab sebagai Koordinator umum Dewan Komisaris.
2. Melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris secara tertulis yang disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
3. Mengkoordinasikan serta memastikan pelaksanaan tugas dan Rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan yang berlaku.

PRESIDENT COMMISSIONER'S DUTIES AND RESPONSIBILITIES

1. Responsible as general coordinator of the Board of Commissioners;
2. Summon for Board of Commissioners' meetings in writing to all members of Board of Commissioners;
3. Coordinates and ensures the Board of Commissioners' duties and meetings are implemented in accordance with applicable regulations.

KEPUTUSAN YANG PERLU MENDAPAT PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS

Perbuatan-perbuatan Direksi yang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris yaitu:

1. Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka pendek;
2. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (*Build Operate Transfer*/BOT), Bangun Milik Serah (*Build Own Transfer*/BOwT), Bangun Serah Guna (*Build Transfer Operate*/BTO) dan kerjasama lainnya dengan nilai a tau jangka waktu tertentu yang ditetapkan RUPS;
3. Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang, kecuali pinjaman (utang atau piutang) yang timbul karena transaksi bisnis, dan pinjaman yang diberikan kepada Anak Perusahaan dengan ketentuan pinjaman kepada Anak Perusahaan dilaporkan kepada Dewan Komisaris;
4. Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati;
5. Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap bergerak dalam kondisi tertentu (hilang, musnah, rusak yang tidak dapat dipindahtangankan (total *lost*), biaya pemindahtangannnya lebih besar daripada nilai ekonomis yang diperoleh dari pemindahtanganan, dibongkar untuk dibangun kembali atau dibangun menjadi aktiva tetap yang lain, yang anggarannya telah ditetapkan oleh RUPS/Menteri melalui pengesahan RKAP, dan dibongkar untuk tidak dibangun kembali sehubungan dengan adanya program lain yang telah direncanakan RKAP;
6. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi;
7. Mengangkat dan memberhentikan Kepala Satuan Pengawasan Intern;
8. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan.

DECISIONS REQUIRING BOARD OF COMMISSIONERS' APPROVAL

The Board of Directors' actions that must first obtain approval from Board of Commissioners are:

1. Collateralize fixed assets for short-term credit withdrawals;
2. Establish cooperation with business entities or other parties in the form of licensing cooperation, management contracts, leasing assets, Joint Operations (JO), Build Operate Transfers (BOT), Build Own Transfers (BOwT), Build Transfer Operate (BTO) and other collaborations with a certain value or period of time determined by the GMS;
3. Receive or provide medium/long term loans, except for loans (payables or receivables) arising from business transactions, and loans granted to Subsidiaries with the condition that loans to Subsidiaries are reported to the Board of Commissioners;
4. Eliminating bad debts and dead goods inventory from the books;
5. Releasing and writing off movable fixed assets under certain conditions (lost, destroyed, damaged which cannot be transferred (total lost), the cost of transferring is greater than the economic value obtained from the transfer, dismantled to be rebuilt or built into other fixed assets, whose budget has been determined by the GMS/ Minister through the RKAP approval, and dismantled not to be rebuilt in connection with other programs that have been planned by the RKAP;
6. Establish an organizational structure 1 (one) level below the Board of Directors;
7. Appoint and dismiss the Head of Internal Audit Unit;
8. Appoint and dismiss the Corporate Secretary.

MASA JABATAN DEWAN KOMISARIS

Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. Jabatan Anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:

1. Meninggal dunia;
2. Masa jabatan berakhir, termasuk mengundurkan diri dari jabatannya;
3. Diberhentikan berdasarkan RUPS; dan/atau
4. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.

PERSYARATAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

1. Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris, seseorang harus memenuhi syarat materil yaitu:
   a. Integritas;
   b. Dedikasi;
   c. Memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
   d. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha di mana yang bersangkutan dicalonkan; dan
   e. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
2. Selain memenuhi kriteria huruf a di atas, untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris harus memenuhi syarat formal yaitu Orang yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
   a. Dinyatakan pailit;
   b. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan, anak Perusahaan dan/atau Badan Usaha dinyatakan pailit; atau
   c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara, perusahaan, anak perusahaan, badan usaha lainnya dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

   Pemenuhan persyaratan tersebut, dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Dewan Komisaris dan surat tersebut disimpan oleh Perusahaan.

BOARD OF COMMISSIONERS TENURE

Members of Board of Commissioners are appointed for a period of 5 (five) years and may be reappointed for 1 (one) tenure. Members of Board of Commissioners may be dismissed at any time based on the GMS Resolution by stating the reasons. Member of Board of Commissioners tenure ends if:

1. Passes away;
2. The tenure ends, including resignation from his/her position;
3. Dismissed based on the GMS; and/or
4. No longer fulfils the requirements as a member of Board of Commissioners based on the Articles of Association and other laws and regulations.

CRITERIA FOR BOARD OF COMMISSIONERS MEMBERS

1. To be appointed as a member of Board of Commissioners, a person must fulfil the material requirements, namely:
   a. Integrity;
   b. Dedication;
   c. Understanding of Company management issues relating to one of the management functions;
   d. Have sufficient knowledge in the business field in which he/she is nominated; and
   e. Can provide sufficient time to carry out his/her duties.
2. In addition to fulfilling the criteria in letter a above, to be appointed as a member of Board of Commissioners must fulfil the formal requirements, i.e. a person who can be appointed as a member of Board of Commissioners is an individual who is capable of performing legal acts, unless within 5 (five) years prior to his/her appointment has:
   a. Declared bankrupt;
   b. Being a member of Board of Directors or a member of Board of Commissioners or a member of Supervisory Board found guilty of causing a Company, subsidiary and/or business entity to be declared bankrupt; or
   c. Convicted of a criminal offence that is detrimental to State finances, companies, subsidiaries, other business entities and/or related to the financial sector.

   Fulfilment of these requirements is evidenced by a statement letter signed by the prospective member of Board of Commissioners and the letter is kept by the Company.

3. Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris, selain memenuhi syarat meteril dan syarat formal sebagaimana point a dan b di atas, maka seseorang juga harus memenuhi syarat lain sebagai berikut:
   a. Bukan pengurus partai politik, calon anggota legislatif, dan/atau anggota legislatif pada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
   b. Bukan calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah, termasuk penjabat kepala/wakil kepala daerah;
   c. Tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan BUMN/Anak Perusahaan yang bersangkutan;
   d. Tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN atau Dewan Komisaris pada Anak Perusahaan yang bersangkutan selama 2 (dua) periode;
   e. Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris;
   f. Sehat jasmani dan rohani, yang tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit; dan
   g. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

4. Persyaratan lainnya
   Selain memenuhi persyaratan umum, pengangkatan anggota Dewan Komisaris juga dilaksanakan dengan memperhatikan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

   Mantan anggota Direksi dapat menjadi anggota Dewan Komisaris, setelah tidak menjabat sebagai anggota Direksi paling sedikit 1 (satu) tahun, kecuali dengan pertimbangan tertentu yang diputuskan oleh Menteri dalam rangka menjaga kesinambungan program penyehatan perusahaan, sepanjang tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang melarangnya.

PEDOMAN TATA LAKSANA KERJA HUBUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI (BOARD MANUAL)

Pedoman Tata Laksana Kerja Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual) telah disahkan berdasarkan Peraturan Direksi Nomor HK.01/27/11/2/TKPT/UTMA/PLND-23 tanggal 27 November 2023 . Ruang lingkup Pedoman Tata Laksana Kerja Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual) Pelindo mengatur dan

3. To be appointed as a member of Board of Commissioners, in addition to fulfilling the material and formal requirements as point a and b above, a person must also fulfil other requirements as follows:

   a. Not a political party administrator, legislative candidate, and/or legislative member of the House of Representatives, Regional Representative Council, Provincial Representative Council, and Regency/City Regional Representative Council;
   b. Not a candidate for head/deputy head of the region and/or head/deputy head of the region, including acting head/deputy head of the region;
   c. Not currently holding a position that has the potential to cause a conflict of interest with the SOE/Subsidiary concerned;
   d. Not serving as a member of Board of Commissioners/Supervisory Board at SOE or Board of Commissioners at the relevant Subsidiary for 2 (two) periods;
   e. Not currently holding a position that is prohibited by law to be concurrently held by a member of Board of Commissioners;

   f. Physically and mentally healthy, who is not currently suffering from an illness that may hinder the performance of duties as a member of Board of Commissioners/Supervisory Board, as evidenced by a medical certificate from a hospital; and

   g. Have a Taxpayer Identification Number (NPWP) and have fulfilled the obligation to pay taxes for the last 2 (two) years.

4. Other requirements
   In addition to fulfilling the general requirements, the appointment of members of Board of Commissioners is also carried out with due observance of the requirements stipulated in the prevailing laws and regulations.

   Former members of Board of Directors may become members of Board of Commissioners, after not serving as members of Board of Directors for at least 1 (one) year, except with certain considerations decided by the Minister in order to maintain the continuity of the Company's restructuring program, as long as there are no other provisions of laws and regulations that prohibit it.

BOARD MANUAL OF BOARD OF COMMISSIONERS

Guidelines for Working Procedures of the Relations of Board of Commissioners and Board of Directors (Board Manual) has been approved based on Board of Directors Regulation No. HK.01/27/11/2/TKPT/UTMA/PLND-23 dated November 27, 2023. The scope of Pelindo's Board Manual regulates and explains the standardised working

menjelaskan pola hubungan kerja yang baku antara Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing, agar tercipta tata Kelola perusahaan yang baik, professional, transparan, efektif dan efisien. Pedoman Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris dan Direksi Pelindo telah diperbaharui sesuai dengan aturan terbaru Kementerian BUMN yaitu Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

Adapun isi dari Tata Laksana Kerja Dewan Komisaris dijelaskan secara khusus dalam Bab III, yang mencakup:
1. Fungsi Dewan Komisaris;
2. Keanggotaan Dewan Komisaris;
3. Etika Jabatan Dewan Komisaris;
4. Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris;
5. Kewajiban Dewan Komisaris;
6. Tanggung Jawab Dewan Komisaris;
7. Hak Dewan Komisaris;
8. Prinsip-Prinsip Pengambilan Keputusan Dewan Komisaris;
9. Program Pengenalan dan Peningkatan Kapabilitas;
10. Organ Pendukung Dewan Komisaris;
11. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris;
12. Kriteria Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris.

PEMBIDANGAN TUGAS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS

Pembidangan tugas Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor 07/KEP-DK/PI/VII-2025 tanggal 4 Juli 202Adapun pembagian tugas anggota Dewan Komisaris Pelindo adalah sebagai berikut.

relationship pattern between Board of Commissioners and Board of Directors in carrying out their respective duties and responsibilities, in order to create good, professional, transparent, effective and efficient corporate governance. Pelindo's Board Manual has been updated in accordance with the latest regulations of the Ministry of SOEs, namely Regulation of the Minister of SOEs No. PER-02/MBU/03/2023 on Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises and Regulation of the Minister of SOEs No. PER-03/MBU/03/2023 on Organs and Human Capital of State-Owned Enterprises.

The contents of Board Manual of Board of Commissioners are described specifically in Chapter III, which includes:
1. Functions of Board of Commissioners;
2. Membership of Board of Commissioners;
3. Ethics of Board of Commissioners;
4. Duties and Authorities of Board of Commissioners;
5. Obligations of Board of Commissioners;
6. Responsibilities of Board of Commissioners;
7. Rights of Board of Commissioners;
8. Principles of Board of Commissioners Decision Making;
9. Induction and Capability Improvement Program;
10. Supporting Organs of Board of Commissioners;
11. Performance Appraisal of Board of Commissioners;
12. Criteria of Performance Evaluation of Board of Commissioners.

BOARD OF COMMISSIONERS DIVISION OF DUTIES

The Board of Commissioners' duties are assigned based on Board of Commissioners Decree Number 07/KEP-DK/PI/VII-2025 dated July 4, 2025. The duties of members of Pelindo Board of Commissioners are as follows.

Tabel Pembidangan Tugas Dewan Komisaris
Tabel Pembidangan Tugas Dewan Komisaris

Nama Name	**Jabatan** Position	**Bidang Tugas** Field of Work
Agus Suhartono	Komisaris Utama/ Komisaris Independen President Commissioner/ Independent Commissioner	Koordinator Umum dan Bidang Tata Kelola Terintegrasi, dan sebagai Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi; General Coordinator and Integrated Governance Division, and Chairman of Integrated Governance Committee;
Suntana	Wakil Komisaris Utama Deputy President Commissioner	Bidang Transformasi dan pengembangan bisnis dan sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Transformation and Business Development Division, and Chairman of Nomination and Remuneration Committee;
Maximianus Puguh Djiwanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Bidang Audit, Keuangan, dan sebagai Ketua Komite Audit Audit, Finance Division, and Chairman of Audit Committee;
Rakhman Fuadhy Kurniawan	Komisaris Independen Independent Commissioner	Bidang Pengadaan Bara/Jasa, Operasional dan Sistem Informasi, dan sebagai Wakil Ketua Komite Audit Procurement of Goods/Services, Operations, and Information Systems Division, and Deputy Chairman of Audit Committee;
Jodi Mahardi	Komisaris Commissioner	Bidang Teknik, Komersial, Manajemen Risiko, dan sebagai Ketua Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko Technical, Commercial, and Risk Management Division, and Chairman of GCG and Risk Management Monitoring Committee;

Tabel Pembidangan Tugas Dewan Komisaris
Tabel Pembidangan Tugas Dewan Komisaris

Nama Name	**Jabatan** Position	**Bidang Tugas** Field of Work
Andus Winarno	Komisaris Komisaris	Bidang Remunerasi dan Sumber Daya Manusia, dan sebagai Wakil Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Remuneration and Human Resources Division, and Deputy Chairman of Nomination and Remuneration Committee

Pembidangan tugas Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor 12/KEP-DK/PI/IX-2024 tanggal 26 September 202Adapun pembagian tugas anggota Dewan Komisaris Pelindo adalah sebagai berikut.

The division of duties of Board of Commissioners is based on the Decree of Board of Commissioners Number 12/KEP-DK/PI/IX-2024 dated September 26, 2025. The division of duties of members of Pelindo Board of Commissioners is as follows.

Nama	**Jabatan**	**Bidang Tugas**
Agus Suhartono	Komisaris Utama/ Komisaris Independen President Commissioner/ Independent Commissioner	Koordinator Umum dan Bidang Tata Kelola Terintegrasi, dan sebagai Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi; General Coordinator and Integrated Governance Division, and Chairman of Integrated Governance Committee;
Suntana	Wakil Komisaris Utama Deputy President Commissioner	Bidang Transformasi dan pengembangan bisnis dan sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Transformation and Business Development Division, and Chairman of Nomination and Remuneration Committee;
Maximianus Puguh Djiwanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Bidang Audit, Keuangan, dan sebagai Ketua Komite Audit Audit, Finance Division, and Chairman of Audit Committee;
Rakhman Fuadhy Kurniawan	Komisaris Independen Independent Commissioner	Bidang Teknologi, Investasi, dan sebagai Wakil Ketua Komite Audit Technology, Investment Field, and Deputy Chairman of Audit Committee;
Ilhamsyah	Komisaris Independen Independent Commissioner	Bidang Pengadaan Barang/Jasa, dan sebagai Anggota Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko Procurement of Goods/Services, Operations, and Information Systems Division, and Deputy Chairman of Audit Committee;
Jodi Mahardi	Komisaris Commissioner	Bidang Komersial, Manajemen Risiko, dan sebagai Ketua Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko Commercial, Risk Management Field, and Chairman of GCG and Risk Management Monitoring Committee;
Elwi Danil	Komisaris Commissioner	Bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Hukum, dan Kemasyarakatan, dan sebagai Wakil Ketua Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko Social and Environmental, Legal, and Community Responsibility Field, and Deputy Chairman of GCG and Risk Management Monitoring Committee;
Arief Poyuono	Komisaris Commissioner	Bidang Remunerasi dan Sumber Daya Manusia, dan sebagai Wakil Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Remuneration and Human Capital Field, and Deputy Chairman of Nomination and Remuneration Committee

KEBIJAKAN RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada badan usaha lainnya, dengan ketentuan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral;
2. Dewan Komisaris yang merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada badan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada point a di atas harus memenuhi persentase kehadiran dalam rapat Dewan Komisaris perusahaan selama 1 (satu) tahun paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) kehadiran, sebagai persyaratan untuk memperoleh Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus bagi yang bersangkutan;

POLICY OF BOARD OF COMMISSIONERS CONCURRENT POSITION

1. Board of Commissioners may concurrently serve as the Board of Commissioners of other business entities, subject to the provisions of sectoral laws and regulations;
2. Board of Commissioners who concurrently serves as the Board of Commissioners of other business entities as referred to in point a above must meet the percentage of attendance at the Company's Board of Commissioners meetings for 1 (one) year of at least 75% (seventy five per cent) attendance, as a requirement for obtaining Tantiem/ Performance Incentive/Special Incentive for the person concerned;

3. Anggota Dewan Komisaris Perusahaan dilarang memangku jabatan rangkap sebagai anggota Dewan Komisaris BUMN, kecuali berdasarkan penugasan khusus dari Menteri;
4. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai anggota Direksi pada BUMN, badan usaha lainnya atau menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris BUMN, atau jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan perusahaan, serta menandatangani surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan tersebut jika terpilih sebagai anggota Dewan Komisaris BUMN;
5. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang memangku jabatan rangkap sebagaimana dimaksud pada point a dan b di atas, berakhir karena hukum sejak anggota Dewan Komisaris bersangkutan lainnya atau anggota Direksi atau RUPS/Menteri mengetahui perangkapan jabatan sebagaimana dimaksud;
6. Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahui perangkapan jabatan sebagaimana dimaksud pada point a dan b di atas, anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi BUMN, harus menyampaikan pemberitahuan kepada RUPS/Menteri terkait perangkapan jabatan dimaksud, untuk selanjutnya dilakukan proses penetapan pemberhentian;
7. Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama perusahaan oleh anggota Dewan Komisaris setelah berakhir karena hukum sebagaimana dimaksud pada point c di atas adalah tidak sah dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota Dewan Komisaris;
8. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada point e di atas tidak mengurangi tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan terhadap kerugian Perusahaan yang disebabkan kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya;
9. Apabila anggota Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud, berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.

3. Members of the Company's Board of Commissioners are prohibited from holding concurrent positions as members of Board of Commissioners of SOEs, except based on special assignment from the Minister;
4. Members of Board of Commissioners are prohibited from holding concurrent positions as members of Board of Directors in SOEs, other business entities or holding positions that based on laws and regulations are prohibited to be concurrent with the position of member of Board of Commissioners of SOEs, or positions that may cause conflict of interest with the Company, and sign a statement letter willing to resign from the position if elected as a member of Board of Commissioners of SOEs;
5. The tenure of a member of Board of Commissioners holding a concurrent position as referred to in points a and b above, shall expire by operation of law from the time the other members of Board of Commissioners or members of Board of Directors or GMS/Minister are aware of such concurrent position;
6. Within a period of no later than 7 (seven) days from the time the member of Board of Commissioners or member of Board of Directors of SOE becomes aware of the concurrent position as referred to in point a and b above, member of Board of Commissioners or member of Board of Directors of SOE, must submit notification to GMS/Minister regarding the concurrent position, for further process of determination of dismissal;
7. Legal actions carried out for and on behalf of the Company by members of Board of Commissioners after the expiration of the law as referred to in point c above are invalid and become the member of Board of Commissioners' personal responsibility;
8. The provisions referred to in point e above do not reduce the member of the Board of Commissioners concerned's responsibility for the Company's losses caused by the error or negligence of the member of Board of Commissioners in carrying out his/her duties;
9. If the Board of Commissioners consists of 2 (two) or more members of Board of Commissioners, the responsibility as referred to shall apply jointly and severally to each member of Board of Commissioners/Supervisory Board of SOE.

Tabel Rangkap Jabatan Dewan Komisaris
Tabel Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Nama Name	**Jabatan** Position	**Jabatan pada Perusahaan/ Instansi Lain** Position at Other Companies/ Agencies	**Nama Perusahaan/** Instansi Lain Name of Other Companies/Agencies
Agus Suhartono	Komisaris Utama/ Independen President/Independent Commissioner	-	-
Suntana	Wakil Komisaris Utama Deputy President Commissioner	-	-
Heru Sukanto*	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	-
Jodi Mahardi	Komisaris Commissioner	Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Deputy for Maritime Sovereignty and Energy Coordination	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Coordinating Ministry for Maritime Affairs and Investment
Andus Winarno**	Komisaris Commissioner	-	-
Elwi Danil	Komisaris Commissioner	Guru Besar Hukum Pidana Professor of Criminal Law	Universitas Andalas Padang Andalas University, Padang
		Pengajar dan Penguji Lecturer and Examiner	Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan Doctoral Program in Law, University of North Sumatra, Medan
		Tenaga Pengajar Lecturer	Badiklat Kejaksaan Agung RI Indonesia Attorney General's Office Training Institute
Rakhman Fuadhy	Komisaris Independen Independent Commissioner	Pendiri dan Pemilik Founder and Owner	Sesora Co, Ltd
Maximianus Puguh Djiwanto***	Komisaris Independen Independent Commissioner	*Finance Director*	PT Pam Lyonnaise Jaya
Arief Poyuono****	Komisaris Independen Independent Commissioner	*Adviser*	Metro Kajang Berhad
		Adviser	PT Agro Artha Surya
Ilhamsyah****	Komisaris Commissioner	Ketua Umum Chairman	Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI)

PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris hendaknya senantiasa menghindari adanya benturan kepentingan, antara lain dengan:

1. Menghindari setiap aktivitas yang dapat mempengaruhi independensinya dalam melaksanakan tugas;
2. Wajib Mengisi Daftar Khusus yang berisikan informasi kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perusahaan lain, termasuk bila tidak memiliki kepemilikan saham, serta secara berkala setiap akhir tahun melakukan pembaruan (*updating* dan wajib memberitahukan Perseroan bila ada perubahan data sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MANAGEMENT OF BOARD OF COMMISSIONERS CONFLICTS OF INTEREST

Board of Commissioners should always avoid conflicts of interest, among others by:

1. Avoid any activity that can affect his/her independence in carrying out his duties;
2. Fill out a Special Register containing information on ownership of shares and/or their families in other companies, including if they do not have share ownership, and periodically update each year at the end of the year and are obliged to notify the Company if there are changes to the data in accordance with the applicable laws and regulations;

3. Tidak menanggapi permintaan dari pihak manapun dan dengan alasan apapun, baik permintaan secara langsung dari pihak-pihak tertentu termasuk dan tidak terbatas pada pejabat/pegawai di lingkungan instansi pemerintah dan partai politik yang berkaitan dengan permintaan sumbangan, termasuk yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di Perseroan sepanjang hal tersebut dapat mempengaruhi pengambilan suatu keputusan;
4. Berpedoman untuk tidak memanfaatkan jabatan bagi kepentingan pribadi atau bagi kepentingan orang atau pihak lain yang terkait yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan;
5. Melakukan pengungkapan dalam hal terjadi benturan kepentingan dan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak boleh melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan Perseroan yang berkaitan dengan hal tersebut. Dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan perusahaan atau mengurangi keuntungan perusahaan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan.

3. Not responding to requests from any party and for any reason, whether direct requests from certain parties including but not limited to officials/employees within government agencies and political parties relating to requests for donations, including those relating to the procurement of goods and services in the Company and can affect the decision making;
4. Firm in not taking advantage of his/her position for personal interests or for the interests of other people or related parties that are contrary to the interests of the Company;
5. Disclose if a conflict of interest occur and the concerned member of Board of Commissioners shall not be involved in the Company's decision-making process related to this matter. Prohibited to take actions that could harm the Company or reduce the Company's profits and must disclose conflicts of interest in every decision.

KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS SHARE OWNERSHIP

Tabel Kepemilikan Saham Dewan Komisaris
Board of Commissioners Share Ownership

Nama Name	**Jabatan** Position	**Kepemilikan Saham** Share Ownership	
		Pelindo	**Perusahaan Lain** Other Companies
Agus Suhartono	Komisaris Utama/Independen President/Independent Commissioner	Nihil Nil	Nihil Nil
Suntana	Wakil Komisaris Utama Deputy President Commissioner	Nihil Nil	Nihil Nil
Heru Sukanto*	Komisaris Independen Independent Commissioner	Nihil Nil	Nihil Nil
Jodi Mahardi	Komisaris Commissioner	Nihil Nil	Nihil Nil
Andus Winarno**	Komisaris Commissioner	Nihil Nil	Nihil Nil
Elwi Danil	Komisaris Commissioner	Nihil Nil	Nihil Nil
Rakhman Fuadhy	Komisaris Independen Independent Commissioner	Nihil Nil	• PT Prima Indo Niaga (100 lembar) • PT Sejuk Solusi Nusantara (30 lembar) • PT Armika Sejahtera Bersama (500 lembar) • PT Prima Indo Niaga (100 shares) • PT Sejuk Solusi Nusantara (30 shares) • PT Armika Sejahtera Bersama (500 shares)
Maximianus Puguh Djiwanto***	Komisaris Independen Independent Commissioner	Nihil Nil	Nihil Nil
Arief Poyuono****	Komisaris Independen Independent Commissioner	Nihil Nil	Nihil Nil
Ilhamsyah****	Komisaris Commissioner	Nihil Nil	Nihil Nil

*Berhenti menjabat sejak 25 Juni 2025
**Berhenti menjabat sejak 19 September 2025
***Mulai menjabat sejak 25 Juni 2025
****Mulai menjabat sejak 19 September 2025
*Ceased to hold office as of June 25, 2025
**Ceased to hold office as of September 19, 2025
***Assumed office as of June 25, 2025
****Assumed office as of September 19, 2025

KOMISARIS INDEPENDEN

Per 31 Desember 2025, anggota Dewan Komisaris Independen berjumlah 4 (empat) orang atau 50% dari total anggota Dewan Komisaris yang berjumlah 8 (delapan) orang, sehingga telah memenuhi kriteria yang disyaratkan, yaitu minimal 20 persen dari total anggota Dewan Komisaris Perseroan.

INDEPENDENT COMMISSIONER

As of December 31, 2025, the number of Independent Commissioners is 4 (four) persons or 50% of the total number of Independent Commissioners of 8 (eight) persons, thus fulfilling the required criteria, namely a minimum of 20 percent of the total number of Independent.

KRITERIA DAN PERNYATAAN KOMISARIS INDEPENDEN

INDEPENDENT COMMISSIONER CRITERIA AND STATEMENT

Kriteria Komisaris Independen Independent Commissioner Criteria	Komisaris Independen Independent Commissioner				
	Agus Suhartono	Heru Sukanto*	Rakhman Fuady Kurniawan	Maximianus Puguh Djiwanto	Arief Poyuono
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya Not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the activities of the Issuer or Public Company within the last 6 (six) months, except for reappointment as Independent Commissioner of the Issuer or Public Company in the following period	√	√	√	√	√
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut. Does not own shares either directly or indirectly in the Issuer or Public Company	√	√	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut. Has no affiliation with the Issuer or Public Company, members of Board of Commissioners, members of Board of Directors, or major shareholder of the Issuer or Public Company.	√	√	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut Does not have business relationship, either directly or indirectly, related to the business activities of the Issuer or Public Company.	√	√	√	√	√

*Berhenti menjabat sejak 25 Juni 2025
*Ceased to hold office as of June 25, 2025

RAPAT DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS MEETINGS

KEBIJAKAN RAPAT

Keputusan-keputusan Dewan Komisaris diambil dalam Rapat Dewan Komisaris. Keputusan dapat pula diambil di luar rapat Dewan Komisaris sepanjang seluruh anggota Dewan Komisaris setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.

Jadwal Rapat

Rapat Dewan Komisaris diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan, dan dapat mengundang Direksi. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan sewaktu-waktu, jika dianggap perlu. Rapat Dewan Komisaris ini merupakan rapat yang bersifat segera dan/atau strategis.

MEETING POLICY

Board of Commissioners decisions are taken at the Board of Commissioners Meeting. Decisions can also be taken outside the Board of Commissioners meeting as long as all members of Board of Commissioners agree on the method and material to be decided.

Meeting Schedule

Board of Commissioners meetings are held at least once in 1 (one) month, and may invite Directors. Board of Commissioners meetings may be held at any time, if deemed necessary. This Board of Commissioners meeting is an immediate and/or strategic meeting.

Tempat Pelaksanaan Rapat

Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di tempat kedudukan atau di tempat kegiatan usaha Perusahaan atau di tempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia.

Penyelenggaran Rapat Melalui Sarana Elektronik

Rapat Dewan Komisaris dapat diselenggarakan melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

Panggilan Rapat

Panggilan rapat dilakukan secara tertulis oleh anggota Dewan Komisaris dan disampaikan dalam jangka waktu sekurang-kurang 3 (tiga) hari kerja sebelum rapat diadakan. Panggilan rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat serta menyertakan agenda dan materi rapat tersebut. Panggilan rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan melalui sarana elektronik

Agenda Rapat

Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengajukan usulan agenda Rapat. Usulan agenda rapat disampaikan kepada Sekretaris Dewan Komisaris. Dalam hal terdapat usulan penambahan agenda rapat pada saat rapat akan segera berlangsung, maka harus disetujui oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat tersebut. Dalam mata acara lain-lain, rapat Dewan Komisaris berhak mengambil keputusan dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pimpinan Rapat

Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan maka telah diatur dalam *Board Manual* PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Etika Rapat

Setiap peserta rapat harus mendukung pelaksanaan rapat Dewan Komisaris agar berjalan secara efektif. Tata tertib Rapat Dewan Komisaris lebih lanjut diatur dalam Board Manual PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Kuorum Rapat

Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris.

Meeting Place

Board of Commissioners meetings may be held at the Company's domicile or place of business or at any other place within the territory of the Republic of Indonesia.

Meeting Holding Through Electronic Media

Board of Commissioners meetings may be held through teleconference, video conference or other electronic media that allow all participants of the Board of Commissioners meeting to see and hear each other directly and participate in the meeting.

Meeting Summons

Meeting summons shall be made in writing by a member of Board of Commissioners and delivered within a period of at least 3 (three) business days before the meeting is held. Summons to the Board of Commissioners meeting must include the event, date, time and place and include the agenda and materials of the meeting. Summons to the Board of Commissioners meeting may be made through electronic media.

Meeting Agenda

Each member of Board of Commissioners has the right to propose the Meeting agenda. The proposed meeting agenda is submitted to Secretary of Board of Commissioners. In the event that there is a proposal to add to the meeting agenda when the meeting is about to take place, it must be approved by all members of Board of Commissioners present at the meeting. In other agenda items, Board of Commissioners meetings are entitled to make decisions with due observance of the provisions of Articles of Association and prevailing laws and regulations.

Meeting Chairman

Board of Commissioners meetings are chaired by the President Commissioner. In the event that the President Commissioner is absent or absent, the meeting shall be chaired by a member of the Board of Commissioners appointed by the President Commissioner. In the event that the President Commissioner does not make an appointment, it has been regulated in the PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board Manual.

Meeting Ethics

Each meeting participant must support the implementation of Board of Commissioners meetings to run effectively. The Board of Commissioners Meeting rules are further regulated in the PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board Manual.

Meeting Quorum

Board of Commissioners meetings are valid and entitled to make binding decisions if attended or represented by more than 1/2 (one-half) of the total number of members of Board of Commissioners.

Keterwakilan anggota Dewan Komisaris dalam rapat hanya dapat dilakukan dengan mewakilkan kepada anggota Dewan Komisaris lainnya secara tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut dan dengan ketentuan bahwa satu orang anggota Dewan Komisaris hanya dapat mewakili satu orang anggota Dewan Komisaris lainnya.

Pengambilan Keputusan Dalam Rapat

Setiap peserta rapat Dewan Komisaris wajib terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan dalam rapat. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dan ditambah 1 (satu) suara untuk anggota Dewan Komisaris yang diwakilinya.Apabila jumlah suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan rapat adalah sama dengan pendapat pimpinan rapat, dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan. Ketentuan lain terkait pengambilan keputusan dalam rapat telah diatur dalam Board Manual PT Pelabuhan Indonesia (Persero)

Perbedaan Pendapat (Dissenting Opinion)

Perbedaan pendapat yang terjadi harus dimasukkan dalam Risalah Rapat dan anggota Dewan Komisaris Perbedaan pendapat tidak berarti memberikan hak kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan untuk tidak melaksanakan hasil keputusan rapat. Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila terbukti bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perusahaan.

Risalah Rapat

Setiap rapat Dewan Komisaris harus dibuatkan risalah rapat. Risalah rapat ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dan oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat.Risalah rapat dibuat dan diadministrasikan oleh Sekretaris Dewan Komisaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

Risalah rapat harus sudah selesai dan diedarkan keseluruh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas maksimal pada selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Rapat selesai dilaksanakan. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mendapatkan salinan risalah rapat. Informasi lain terkait risalah rapat dewan komisaris telah di atur dalam Board Manual PT Pelabuhan Indonesia (Persero)

Evaluasi Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya

Dalam rangka memastikan tindak lanjut rapat sebelumnya, maka Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap hal-hal yang perlu ditindaklanjuti.

Kehadiran Direksi Dalam Rapat Dewan Komisaris

Kehadiran Direksi dalam rapat Dewan Komisaris dimungkinkan apabila Direksi atau salah satu anggota Direksi diundang oleh Dewan Komisaris untuk menjelaskan, memberikan masukan atau melakukan diskusi.

Representation of members of Board of Commissioners in the meeting can only be done by delegating to other members of Board of Commissioners in writing given specifically for that purpose and provided that one member of Board of Commissioners can only represent one other member of Board of Commissioners.

Decision-Making in the Meeting

Every participant of Board of Commissioners meeting shall be involved in every decision-making process in the meeting. Each member of Board of Commissioners is entitled to cast 1 (one) vote and plus 1 (one) vote for the member of Board of Commissioners he/she represents. If the number of votes for and against is equal, then the meeting decision is the same as the meeting chairman's opinion, with due regard to the provisions regarding accountability as stipulated in the Company's Articles of Association. Other provisions related to decision making in meetings are regulated in the PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board Manual.

Dissenting Opinion

Dissenting opinions that occur must be included in the Meeting Minutes and members of Board of Commissioners dissenting opinion does not mean giving the relevant member of Board of Commissioners the right not to implement the meeting's decision. Board of Commissioners is jointly and severally personally liable if proven guilty or negligent in carrying out their duties for the interests and business of the Company.

Minutes of Meeting

Minutes of each Board of Commissioners meeting shall be prepared. The meeting minutes shall be signed by the Chairman of Meeting and by all members of Board of Commissioners present at the meeting. The meeting minutes shall be prepared and administered by Secretary of Board of Commissioners or other officer appointed by Board of Commissioners.

The minutes of meeting must be completed and circulated to all members of Board of Commissioners/Supervisory Board at the latest 7 (seven) working days after the Meeting is completed. Each member of Board of Commissioners is entitled to obtain a copy of the meeting minutes. Other information related to the minutes of board of commissioners meetings has been regulated in the PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board Manual.

Evaluation on Follow-up of Previous Meetings

In order to ensure the follow-up of the previous meeting, the Board of Commissioners must evaluate matters that need to be followed up.

Board of Directors Attendance in Board of Commissioners Meeting

Board of Directors attendance at Board of Commissioners meetings is possible if the Board of Directors or a member of Board of Directors is invited by the Board of Commissioners to explain, provide input or conduct discussions.

RENCANA RAPAT DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS MEETING PLAN

RENCANA RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS INTERNAL MEETING PLAN

Rencana Rapat Internal Dewan Komisaris

No	Minggu Week	Agenda
1	Minggu #01 Januari 2025 Week #01 January 2025	• Pembahasan hasil rapat terdahulu • Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris • Pembahasan realisasi KPI Dewan Komisaris Tahun 2024 • Pembahasan realisasi KPI individu Dewan Komisaris Tahun 2024 • Pembahasan realisasi rencana kerja dan laporan kegiatan Komite Dewan Komisaris Tahun 2024 • Lain-lain • Discussion of the results of previous meeting • Discussion of matters requiring approval/response from the Board of Commissioners • Discussion of the realization of Board of Commissioners' KPIs for 2024 • Discussion of the realization of Board of Commissioners' individual KPIs for 2024 • Discussion of the realization of Board of Commissioners' work plans and activity reports for 2024 • Miscellaneous
2	Minggu #02 Januari 2025 Week #02 January 2025	• Pembahasan hasil rapat terdahulu • Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris • Pembahasan konsep evaluasi dan arahan Dewan Komisaris atas kebijakan pengelolaan perusahaan. • Lain-lain • Discussion of the results of previous meeting • Discussion of matters requiring approval/response from the Board of Commissioners • Discussion of Board of Commissioners' evaluation concept and direction regarding company management policies. • Miscellaneous
3	Minggu #03 Januari 2025 Week #03 January 2025	• Pembahasan hasil rapat terdahulu • Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris • Persiapan Rakomdir • Lain-lain • Discussion of the results of previous meeting • Discussion of matters requiring approval/response from the Board of Commissioners • Preparation of the Coordinating Board Meeting • Miscellaneous
4	Minggu #01 Februari 2025 Week #01 Februarr 2025	• Pembahasan hasil rapat terdahulu • Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris • Pembahasan progres audit tahun buku 2024 • Lain-lain • . Discussion of the results of previous meeting • Discussion of matters requiring approval/response from the Board of Commissioners • Discussion of audit progress for the 2024 fiscal year • Miscellaneous
5	Minggu #02 Februari 2025 Week #02 Februarr 2025	• Pembahasan hasil rapat terdahulu • Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris • Pembahasan konsep evaluasi dan arahan Dewan Komisaris atas kebijakan pengelolaan perusahaan. • Lain-lain • . Discussion of the results of previous meeting • Discussion of matters requiring approval/response from the Board of Commissioners • Discussion of the evaluation concept and direction of Board of Commissioners regarding company management policies. • Miscellaneous
6	Minggu #03 Februari 2025 Week #03 Februarr 2025	• Pembahasan hasil rapat terdahulu • Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris • Pembahasan atas hasil audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2024 • Persiapan Rakomdir • Lain-lain • Discussion of the results of previous meeting • Discussion of matters requiring approval/response from the Board of Commissioners • Discussion of the audit results of the 2024 Financial Statements • Preparation of the Coordinating Board Meeting • Miscellaneous

Rencana Rapat Internal Dewan Komisaris

No	Minggu Week	Agenda
7	Minggu #01 Maret 2025 Week #01 March 2025	• Pembahasan hasil rapat terdahulu • Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris • Pembahasan Laporan Tahunan Dewan Komisaris Tahun Buku 2024 • Lain-lain • Discussion of the results of previous meeting • Discussion of matters requiring approval/response from the Board of Commissioners • Discussion of the Annual Report of Board of Commissioners for Fiscal Year 2024 • Miscellaneous
8	Minggu #02 Maret 2025 Week #02 March 2025	• Pembahasan hasil rapat terdahulu • Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris • Pembahasan konsep evaluasi dan arahan Dewan Komisaris atas kebijakan pengelolaan perusahaan. • Lain-lain • Discussion of the results of previous meeting • Discussion of matters requiring approval/response from the Board of Commissioners • Discussion of the concept of evaluation and direction of Board of Commissioners regarding company management policies. • Miscellaneous
9	Minggu #03 Maret 2025 Week #03 March 2025	• Pembahasan hasil rapat terdahulu • Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris • Pembahasan bahan Radirkom • Lain-lain • Discussion of the results of previous meeting • Discussion of matters requiring approval/response from the Board of Commissioners • Discussion of the Coordinating Board Meeting materials • Miscellaneous
10	Minggu #01 April 2025 Week #01 April 2025	• Pembahasan hasil rapat terdahulu • Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris • Pembahasan konsep evaluasi dan arahan Dewan Komisaris atas kebijakan pengelolaan perusahaan. • Lain-lain • Discussion of the results of previous meeting • Discussion of matters requiring approval/response from the Board of Commissioners • Discussion of the concept of evaluation and direction of Board of Commissioners regarding company management policies. • Miscellaneous
11	Minggu #02 April 2025 Week #02 April 2025	• Pembahasan hasil rapat terdahulu • Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris • Pembahasan KPI Dewan Komisaris Triwulan I/2025 • Pembahasan realisasi rencana kerja dan laporan kegiatan Komite Dewan Komisaris Triwulan I/2025 • Lain-lain • Discussion of the results of previous meeting • Discussion of matters requiring approval/response from the Board of Commissioners • Discussion of the Board of Commissioners' KPIs for Q1/2025 • Discussion of the realization of work plan and activity report of Board of Commissioners' Committees for Q1/2025 • Miscellaneous
12	Minggu #03 April 2025 Week #03 April 2025	• Pembahasan hasil rapat terdahulu • Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris • Pembahasan kinerja perusahaan Triwulan I/2025 • Pembahasan bahan Radirkom • Lain-lain • Discussion of the results of previous meeting • Discussion of matters requiring approval/response from the Board of Commissioners • Discussion of the company's performance for Q1/2025 • Discussion of the Coordinating Board Meeting materials • Miscellaneous
13	Minggu #01 Mei 2025 Week #01 May 2025	• Pembahasan hasil rapat terdahulu • Pembahasan tanggapan atas Laporan Manajemen Triwulan I/2025 • Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris • Lain-lain • Discussion of the results of previous meeting • Discussion of responses to the Management Report for Q1/2025 • Discussion of matters requiring approval/response from the Board of Commissioners • Miscellaneous

Rencana Rapat Internal Dewan Komisaris

No	Minggu Week	Agenda
14	Minggu #02 Mei 2025 Week #02 May 2025	• Pembahasan hasil rapat terdahulu • Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris • Pembahasan konsep evaluasi dan arahan Dewan Komisaris atas kebijakan pengelolaan perusahaan. • Lain-lain • Discussion of the results of previous meeting • Discussion of matters requiring approval/response from the Board of Commissioners • Discussion of the evaluation concept and direction of Board of Commissioners regarding company management policies. • Miscellaneous
15	Minggu #03 Mei 2025 Week #03 May 2025	• Pembahasan hasil rapat terdahulu • Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris • Persiapan Rakomdir • Lain-lain • Discussion of the results of previous meeting • Discussion of matters requiring approval/response from the Board of Commissioners • Preparation for the Coordinating Board Meeting • Miscellaneous
16	Minggu #01 Juni 2025 Week #01 June 2025	• Pembahasan hasil rapat terdahulu • Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris • Pembahasan konsep evaluasi dan arahan Dewan Komisaris atas kebijakan pengelolaan perusahaan. • Lain-lain • Discussion of the results of previous meeting • Discussion of matters requiring approval/response from the Board of Commissioners • Discussion of the concept of evaluation and direction of Board of Commissioners regarding company management policies. • Miscellaneous
17	Minggu #02 Juni 2025 Week #02 June 2025	• Pembahasan hasil rapat terdahulu • Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris • Lain-lain • . Discussion of the results of previous meeting • Discussion of matters requiring approval/response from the Board of Commissioners • Miscellaneous
18	Minggu #03 Juni 2025 Week #03 July 2025	• Pembahasan hasil rapat terdahulu • Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris • Pembahasan bahan Radirkom • Lain-lain • Discussion of the results of previous meeting • Discussion of matters requiring approval/response from the Board of Commissioners • Discussion of the Coordinating Meeting Materials • Miscellaneous
19	Minggu #01 Juli 2025 Week #01 July 2025	• Pembahasan hasil rapat terdahulu • Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris • Pembahasan konsep evaluasi dan arahan Dewan Komisaris atas kebijakan pengelolaan perusahaan. • Lain-lain • Discussion of the results of previous meeting • Discussion of matters requiring approval/response from the Board of Commissioners • Discussion of the concept of evaluation and direction of Board of Commissioners regarding company management policies. • Miscellaneous
20	Minggu #02 Juli 2025 Week #02 July 2025	• Pembahasan hasil rapat terdahulu • Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris • Pembahasan konsep Laporan Pengawasan dan KPI Dekom Semester I/2025 • Pembahasan realisasi rencana kerja dan laporan kegiatan Komite Dewan Komisaris Semester I/2025 • Lain-lain • Discussion of the results of previous meeting • Discussion of matters requiring approval/response from the Board of Commissioners • Discussion of the draft Supervisory Report and KPI of Board of Commissioners for Semester I/2025 • Discussion of the realization of work plan and activity report of Board of Commissioners Committees for Semester I/2025 • Miscellaneous

Rencana Rapat Internal Dewan Komisaris

No	Minggu Week	Agenda
21	Minggu #03 Juli 2025 Week #03 July 2025	• Pembahasan hasil rapat terdahulu • Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris • Pembahasan kinera perusahaan Semester II/2025 • Persiapan Rakomdir • Lain-lain • Discussion of the results of previous meeting • Discussion of matters requiring approval/response from the Board of Commissioners • Discussion of the company's performance for Semester II/2025 • Preparation for the Coordinating Board Meeting • Miscellaneous
22	Minggu #01 Agustus 2025 Week #01 August 2025	• Pembahasan hasil rapat terdahulu • Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris • Pembahasan tanggapan atas Laporan Manajemen Semester I/2025 • Pembahasan konsep evaluasi dan arahan Dewan Komisaris atas kebijakan pengelolaan perusahaan. • Lain-lain • Discussion of the results of previous meeting • Discussion of matters requiring approval/response from the Board of Commissioners • Discussion of responses to the Management Report for Semester I/2025 • Discussion of the concept of Board of Commissioners' evaluation and direction regarding company management policies. Others
23	Minggu #02 Agustus 2025 Week #02 August 2025	• Pembahasan hasil rapat terdahulu • Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris • Lain-lain • Discussion of the results of previous meeting • Discussion of matters requiring approval/response from the Board of Commissioners • Others
24	Minggu #03 Agustus 2025 Week #03 August 2025	• Pembahasan hasil rapat terdahulu • Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris • Pembahasan bahan Radirkom • Lain-lain • Discussion of the results of previous meeting • Discussion of matters requiring approval/response from the Board of Commissioners • Discussion of Coordinating Board Meeting materials • Others
25	Minggu #01 September 2025 Week #01 September 2025	• Pembahasan hasil rapat terdahulu • Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris • Pembahasan konsep evaluasi dan arahan Dewan Komisaris atas kebijakan pengelolaan perusahaan. • Lain-lain • Discussion of the results of previous meeting • Discussion of matters requiring approval/response from the Board of Commissioners • Discussion of the evaluation concept and direction of Board of Commissioners regarding company management policies. • Miscellaneous
26	Minggu #02 September 2025 Week #02 September 2025	• Pembahasan hasil rapat terdahulu • Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris • Pembahasan persiapan audit laporan keuangan tahun buku 2025 • Lain-lain • Discussion of the results of previous meeting • Discussion of matters requiring approval/response from the Board of Commissioners • Discussion of preparation for the audit of the 2025 financial statements • Miscellaneous
27	Minggu #03 September 2025 Week #03 September 2025	• Pembahasan hasil rapat terdahulu • Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris • Pembahasan bahan Radirkom • Lain-lain • Discussion of the results of previous meeting • Discussion of matters requiring approval/response from the Board of Commissioners • Discussion of Coordinating Board Meeting materials • Miscellaneous

Rencana Rapat Internal Dewan Komisaris

No	Minggu Week	Agenda
28	Minggu #01 Oktober 2025 Week #01 October 2025	• Pembahasan hasil rapat terdahulu • Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris • Pembahasan konsep evaluasi dan arahan Dewan Komisaris atas kebijakan pengelolaan perusahaan. • Pembahasan Laporan Pengawasan dan KPI Dewan Komisaris Triwulan III/2025 • Pembahasan realisasi rencana kerja dan laporan kegiatan Komite Dewan Komisaris Triwulan III/2025 • Pembahasan RKA Dewan Komisaris Tahun Buku 2025 • Lain-lain • Discussion of the results of previous meeting • Discussion of matters requiring approval/response from the Board of Commissioners • Discussion of the evaluation concept and direction of Board of Commissioners regarding company management policies. • Discussion of the Board of Commissioners' Supervisory Report and KPI for Q3/2025 • Discussion of the realization of work plan and activity report of Board of Commissioners' Committees for Q3/2025 • Discussion of the Board of Commissioners' Work Plan and Budget for Fiscal Year 2025 • Miscellaneous
29	Minggu #02 Oktober 2025 Week #02 October 2025	• Pembahasan hasil rapat terdahulu • Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris • Pembahasan usulan RKAP 2025 • Lain-lain • Discussion of the results of previous meeting • Discussion of matters requiring approval/response from the Board of Commissioners • Discussion of the proposed 2025 Work Plan and Budget (RKAP) • Miscellaneous
30	Minggu #03 Oktober 2025 Week #03 October 2025	• Pembahasan hasil rapat terdahulu • Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris • Pembahasan kinerja perusahaan Triwulan III/2025 • Persiapan Rakomdir • Lain-lain • Discussion of the results of previous meeting • Discussion of matters requiring approval/response from the Board of Commissioners • Discussion of the Company's performance for the third quarter of 2025 • Preparation of the Coordinating Board Meeting • Miscellaneous
31	Minggu #01 November 2025 Week #01 November 2025	• Pembahasan hasil rapat terdahulu • Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris • Pembahasan tanggapan atas Laporan Manajemen Triwulan III/2025 • Pembahasan konsep evaluasi dan arahan Dewan Komisaris atas kebijakan pengelolaan perusahaan. • Lain-lain • Discussion of the results of previous meeting • Discussion of matters requiring approval/response from the Board of Commissioners • Discussion of responses to the Management Report for the third quarter of 2025 • Discussion of the Board of Commissioners' evaluation concept and direction regarding company management policies. • Miscellaneous
32	Minggu #02 November 2025 Week #02 November 2025	• Pembahasan hasil rapat terdahulu • Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris • Lain-lain • Discussion of the results of previous meeting • Discussion of matters requiring approval/response from the Board of Commissioners • Miscellaneous

Rencana Rapat Internal Dewan Komisaris

No	Minggu Week	Agenda
33	Minggu #03 November 2025 Week #03 November 2025	• Pembahasan hasil rapat terdahulu • Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris • Persiapan Rakomdir • Lain-lain • Discussion of the results of previous meeting • Discussion of matters requiring approval/response from the Board of Commissioners • Preparation for the Coordinating Board Meeting • Miscellaneous
34	Minggu #01 Desember 2025 Week #01 December 2025	• Pembahasan hasil rapat terdahulu • Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris • Pembahasan konsep evaluasi dan arahan Dewan Komisaris atas kebijakan pengelolaan perusahaan. • Pembahasan atas konsep tanggapan Dewan Komisaris atas usulan RKAP Tahun 2025 • Lain-lain • Discussion of the results of previous meeting • Discussion of matters requiring approval/response from the Board of Commissioners • Discussion of the Board of Commissioners' evaluation concept and direction regarding company management policies. • Discussion of the Board of Commissioners' response concept to the proposed 2025 Work Plan and Budget (RKAP). • Miscellaneous
35	Minggu #02 Desember 2025 Week #02 December 2025	• Pembahasan hasil rapat terdahulu • Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris • Lain-lain • Discussion of the results of previous meeting • Discussion of matters requiring approval/response from the Board of Commissioners • Miscellaneous
36	Minggu #03 Desember 2025 Week #03 December 2025	• Pembahasan hasil rapat terdahulu • Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris • Persiapan Rakomdir • Lain-lain • Discussion of the results of previous meeting • Discussion of matters requiring approval/response from the Board of Commissioners • Preparation of the Coordinating Board Meeting • Miscellaneous

REALISASI RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS

Sepanjang tahun 2025, agenda, tanggal dan peserta Rapat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut.

REALIZATION OF BOARD OF COMMISSIONERS INTERNAL MEETING

Throughout 2025, agenda, dates and participants of Board of Commissioners Meetings are as follows.

22Tabel Rapat Dewan Komisaris
Board of Commissioners Meetings

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Attendance
1	Kamis, 30 Januari 2025 Thursday, January 30, 2025	Pembahasan Laporan Manajemen Tahun 2024 (Unaudited); • *Update* Permohonan Tanggapan Tertulis Dewan Komisaris atas Rencana Kerjasama; • *Update* Hasil Kunjungan Kerja ke Regional 4 Makassar; • *Update* Hasil *Self Assessment* Peringkat Komposit Risiko TW 4 Tahun 2024; • *Update* Penyiapan Data *Talent Pool* BUMN Tahun 2025; • *Update* Pengawasan atas Pelaksanaan *Employee Well-Being Policy* (EWP) Semester 2 Tahun 2024 PT Pelabuhan Indonesia (Persero) • Hal-hal strategis lainnya. Discussion of the 2024 Management Report (Unaudited); • Update on the Request for Written Response from the Board of Commissioners regarding the Cooperation Plan; • Update on the Results of Working Visit to Region 4 Makassar; • Update on the Results of the Composite Risk Rating Self-Assessment for Q4 2024; • Update on the Preparation of State-Owned Enterprise Talent Pool Data for 2025; • Update on Supervision of the Implementation of Employee Well-Being Policy (EWP) for Semester 2 2024 at PT Pelabuhan Indonesia (Persero). • Other strategic matters.	Agus Suhartono	Hadir Present
			Suntana	Hadir Present
			Jodi Mahardi	Hadir Present
			Heru Sukanto	Hadir Present
			Andus Winarno	Hadir Present
			Elwi Danil	Hadir Present
			Rakhman Fuady Kurniawan	Hadir Present
2	Kamis, 06 Februari 2025 Thursday, February 6, 2025	Pembahasan Penyampaian Konsep Temuan Pemeriksaan Tahap I dan Tahap II. Discussion of the Presentation of Conceptual Findings of Stage I and Stage II Inspections.	Agus Suhartono	Hadir Present
			Suntana	Hadir Present
			Jodi Mahardi	Hadir Present
			Heru Sukanto	Hadir Present
			Andus Winarno	Hadir Present
			Elwi Danil	Hadir Present
			Rakhman Fuady Kurniawan	Hadir Present

22Tabel Rapat Dewan Komisaris
Board of Commissioners Meetings

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Attendance
3	Jum'at, 21 Februari 2025 Friday, February 21, 2025	Pembahasan Laporan Manajemen Bulan Januari 2025; • *Update* Permohonan Tanggapan Tertulis Dewan Komisaris atas Rencana Kerjasama; • *Update* Prosedur Penanganan Insiden; • *Update* Penyiapan Talent Pool BUMN Tahun 2025; • *Update* Hasil Kunjungan Kerja Dewan Komisaris ke Regional 4 Ambon; • *Update* Hasil Rapat Koordinasi Pengawasan Bidang Hukum; • Hal-hal strategis lainnya. Discussion of the January 2025 Management Report; • Update on the Request for Written Response from the Board of Commissioners regarding the Cooperation Plan; • Update on Incident Handling Procedures; • Update on Preparation of the 2025 State-Owned Enterprise Talent Pool; • Update on the Results of Board of Commissioners' Working Visit to Region 4 Ambon; • Update on the Results of Legal Supervision Coordination Meeting; • Other strategic matters.	Agus Suhartono	Hadir Present
			Suntana	Hadir Present
			Jodi Mahardi	Hadir Present
			Heru Sukanto	Hadir Present
			Andus Winarno	Hadir Present
			Elwi Danil	Hadir Present
			Rakhman Fuady Kurniawan	Hadir Present
4	Rabu, 19 Maret 2025 Wednesday, March 19, 2025	Pembahasan *Closing Meeting* Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2024 Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro dan Surja dan Hal-hal strategis lainnya. Discussion of the Closing Meeting of Audit of the 2024 Financial Statements of Public Accounting Firm (KAP) Purwantono, Sungkoro, and Surja and other strategic matters.	Agus Suhartono	Hadir Present
			Suntana	Hadir Present
			Jodi Mahardi	Hadir Present
			Heru Sukanto	Hadir Present
			Andus Winarno	Hadir Present
			Elwi Danil	Hadir Present
			Rakhman Fuady Kurniawan	Hadir Present

22Tabel Rapat Dewan Komisaris
Board of Commissioners Meetings

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Attendance
5	Senin, 24 Maret 2025 Monday, March 24, 2025	Pembahasan Laporan Manajemen Bulan Februari 2025; • Pembahasan Restrukturisasi Pelindo melalui Pengambilalihan Saham Pelindo Marine Service pada Pelindo Energi Logistik oleh Pelindo Multi Terminal; • Pembahasan Tanggapan Direksi atas Permohonan Informasi terkait *Self Assessment* Perubahan *Change of Control* dan Valuasi Nilai Wajar Perseroan; • Pembahasan Hasil Evaluasi dari Kementerian BUMN atas Profil Risiko 2024; • Laporan Kunjungan Kerja ke Cabang Belawan dan Kuala Tanjung; • *Update* Kasus Jambi dan Tindak Lanjut Penyelesaiannya oleh Direksi; • *Update* Kesiapan Pelindo dalam Menyukseskan Program Mudik Lebaran 2025; • Hal-hal strategis lainnya. Discussion of the February 2025 Management Report; • Discussion of Pelindo's Restructuring through the Acquisition of Pelindo Marine Service's Shares in Pelindo Energi Logistik by Pelindo Multi Terminal; • Discussion of the Board of Directors' Response to the Request for Information regarding the Company's Self-Assessment of Change of Control and Fair Value Valuation; • Discussion of the Evaluation Results from the Ministry of State-Owned Enterprises regarding the 2024 Risk Profile; • Report of Working Visit to Belawan and Kuala Tanjung Branches; • Update on Jambi Case and Follow-up Actions by the Board of Directors; • Update on Pelindo's Readiness to Ensure the Success of the 2025 Eid Homecoming Program; • Other strategic matters.	Agus Suhartono	Hadir Present
			Suntana	Hadir Present
			Jodi Mahardi	Hadir Present
			Heru Sukanto	Hadir Present
			Andus Winarno	Hadir Present
			Elwi Danil	Tidak Hadir Absent
			Rakhman Fuady Kurniawan	Hadir Present
6	Rabu, 23 April 2025 Wednesday, April 23, 2025	Analisa Laporan Manajemen Triwulan I 2025; • Permohonan Tanggapan Tertulis atas Rencana Restrukturisasi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) melalui Pengambilalihan Saham PT Pelindo Marine Service pada PT Alur Pelayaran Barat Surabaya oleh PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia; • *Update* terkait Permohonan Tanggapan Tertulis Kerjasama Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Pendukung Terminal Kijing; • *Update* Hasil Monitoring terhadap Profil Risiko Signifikan TW I 2025; • *Update* Tindak Lanjut Penanganan Permasalahan Pekerjaan Pengadaan 2 (dua) Unit Kapal Tunda Kap. 2x1800 untuk Cabang Dumai; • *Update* Tanggapan DK atas Usulan Pemberian Tantiem Tahun 2024 dan Usulan Kenaikan Gaji Dirut Tahun 2025; • Hal-hal strategis lainnya. Analysis of the Management Report for the First Quarter of 2025; • Request for Written Response to the Restructuring Plan of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) through the Acquisition of PT Pelindo Marine Service's Shares in PT Alur Pelayaran Barat Surabaya by PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia; • Update regarding the Request for Written Response to the Cooperation in the Development and Management of Kijing Terminal Support Area; • Update on Monitoring Results of the Significant Risk Profile for Q1 2025; • Update on Follow-up Actions for Handling Issues in the Procurement of 2 (two) 2x1800 Tugboats for Dumai Branch; • Update on the Board of Commissioners' Response to the Proposal for Bonuses in 2024 and the Proposal for a Salary Increase for the President Director in 2025; • Other strategic matters.	Agus Suhartono	Hadir Present
			Suntana	Hadir Present
			Jodi Mahardi	Hadir Present
			Heru Sukanto	Hadir Present
			Andus Winarno	Hadir Present
			Elwi Danil	Hadir Present
			Rakhman Fuady Kurniawan	Hadir Present

22Tabel Rapat Dewan Komisaris
Board of Commissioners Meetings

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Attendance
7	Selasa, 27 Mei 2025 Tuesday, May 27, 2025	Analisa Laporan Manajemen Bulan April 2025; • Laporan Evaluasi KAP Tahun Buku 2024 dan Usulan KAP untuk Tahun Buku 2025; • *Area of improvement* untuk Peran Dewan Komisaris dan Komite Berdasarkan Hasil Penilaian Risk Maturity Index 2024; • *Update* Hasil Monitoring Profil Risiko Signifikan; • *Update* Tindak Lanjut Surat Direksi Terkait Permohonan Tanggapan Tertulis Atas Rencana Kerjasama Pemanfaatan Bagian Tanah HPL Pelabuhan Benoa dan Pemberian Hak Pakai di atas HPL Pelabuhan; • *Update* Pencapaian KPI s.d. Triwulan I Tahun 2025; • *Update* Tindak Lanjut Penanganan Kasus Karyawan di Regional 2 Jambi; • *Update* Hasil Kunjungan Kerja Dewan Komisaris ke Regional 4 dan Makassar New Port (MNP); • Hal-hal strategis lainnya. Analysis of the April 2025 Management Report; • Public Accounting Firm Evaluation Report for Fiscal Year 2024 and Public Accounting Firm Proposal for Fiscal Year 2025; • Areas of improvement for the role of Board of Commissioners and Committees based on the 2024 Risk Maturity Index Assessment; • Update on the Results of Significant Risk Profile Monitoring; • Update on the Follow-up to the Board of Directors' Letter Regarding the Request for Written Response to the Planned Cooperation for the Utilization of Port's HPL Land and the Granting of Usage Rights over the Port's HPL; • Update on KPI Achievements as of the First Quarter of 2025; • Update on Follow-up to the Handling of Employee Cases in Region 2, Jambi; • Update on the Results of Board of Commissioners' Working Visit to Region 4 and Makassar New Port (MNP); • Other strategic matters.	Agus Suhartono	Hadir Present
			Suntana	Hadir Present
			Jodi Mahardi	Hadir Present
			Heru Sukanto	Hadir Present
			Andus Winarno	Hadir Present
			Elwi Danil	Hadir Present
			Rakhman Fuady Kurniawan	Hadir Present
8	Selasa, 24 Juni 2025 Tuesday, June 24, 2025	Analisa Laporan Manajemen Bulan Mei 2025; • Usulan Penghapusbukuan Aset Tetap sebagian Tanah SHGB No. 260/Cilincing seluas 289m2 untuk Pembangunan Sutet 500KV; • Rencana Restrukturisasi PT Pelindo (Persero) Melalui Pengambilalihan Saham Milik PT Pelindo Terminal Petikemas pada PT Berlian Jasa Terminal Indonesia oleh PT Pelindo Solusi Logistik; • *Update* Monitoring terhadap Profil Risiko Signifikan s.d. Bulan Mei 2025; • *Update* Perkembangan Perizinan Pelabuhan; • *Update* Revisi/Penyempurnaan *Charter* Komite Organ Pendukung Dewan Komisaris; • Hal-hal strategis lainnya. Analysis of the May 2025 Management Report; • Proposed Fixed Asset Write-Off of a portion of Land Title No. 260/Cilincing, covering 289m2, for the Construction of a 500KV High-Speed Transmission Line; • Restructuring Plan for PT Pelindo (Persero) Through the Acquisition of Shares of PT Pelindo Terminal Petikemas in PT Berlian Jasa Terminal Indonesia by PT Pelindo Solusi Logistik; • Monitoring Update on Significant Risk Profiles until May 2025; • Update on Port Licensing Developments; • Update on Revisions/Improvements to the Charter of Board of Commissioners' Supporting Organ Committees; • Other strategic matters.	Agus Suhartono	Hadir Present
			Suntana	Hadir Present
			Jodi Mahardi	Hadir Present
			Heru Sukanto	Hadir Present
			Andus Winarno	Hadir Present
			Elwi Danil	Hadir Present
			Rakhman Fuady Kurniawan	Hadir Present

22Tabel Rapat Dewan Komisaris
Board of Commissioners Meetings

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Attendance
9	Kamis, 24 Juli 2025 Thursday, July 24, 2025	Analisa Laporan Manajemen Bulan Juni 2025; • Profil Risiko Triwulan II tahun 2025; • Evaluasi Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL); • *Update* Pembaharuan Dokumen Kebijakan *Contigency Plan* 2026; • Hal-hal strategis lainnya. Analysis of the June 2025 Management Report; • Risk Profile for the Second Quarter of 2025; • Evaluation of Environmental and Social Responsibility (CSR); • Update of the 2026 Contingency Plan Policy Document; • Other strategic matters.	Agus Suhartono	Hadir Present
			Suntana	Hadir Present
			Jodi Mahardi	Hadir Present
			Andus Winarno	Hadir Present
			Elwi Danil	Hadir Present
			Rakhman Fuady Kurniawan	Hadir Present
			Maximianus Puguh Djiwanto	Hadir Present
10	Rabu, 27 Agustus 2025 Wednesday, August 27, 2025	Analisa Laporan Manajemen Bulan Juli 2025; • Analisa Permohonan Tambahan Tanggapan Tertulis Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atas (i) Rencana Pengalihan Aset Alat Bongkar Muat dan Alat Apung PT Pelindo (Persero) kepada Subholding sebagai Tambahan Setoran Modal dan (ii) Amandemen Kerja sama Operasi dan/atau Berita Acara Serah Operasinya antara PT Pelindo (Persero) kepada Subholding; • Pembahasan Rencana Perpanjangan Kerjasama Pemanfaatan Bagian Tanah Hak Pengelolaan (HPL) Untuk Pengoperasian Tangki Timbun Curah Cair di Pelabuhan Dumai Oleh PT Sarana Tempa Perkasa; • Pembahasan Perpanjangan Kerjasama Penggunaan Tanah HPL oleh PT Andahanesa Abadi di Regional 2 Palembang; • *Update* Draft Profil Risiko 2026 & Hasil Monitoring Profil Risiko 2025; • Hal-hal strategis lainnya. Analysis of the July 2025 Management Report; • Analysis of the Request for Additional Written Responses from Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) regarding (i) the Plan to Transfer PT Pelindo (Persero)'s Loading and Unloading Equipment and Floating Equipment Assets to the Subholding as Additional Capital Contribution and (ii) Amendments to the Operational Cooperation Agreement and/or Minutes of Operational Handover between PT Pelindo (Persero) and the Subholding; • Discussion of the Plan to Extend the Cooperation Agreement for the Utilization of a Portion of Land with Management Rights (HPL) for the Operation of Liquid Bulk Storage Tanks at Dumai Port by PT Sarana Tempa Perkasa; • Discussion of the Extension of the Cooperation Agreement for the Use of HPL Land by PT Andahanesa Abadi in Region 2 Palembang; • Update of the 2026 Risk Profile Draft and 2025 Risk Profile Monitoring Results; • Other strategic matters.	Agus Suhartono	Hadir Present
			Suntana	Hadir Present
			Jodi Mahardi	Hadir Present
			Andus Winarno	Hadir Present
			Elwi Danil	Hadir Present
			Rakhman Fuady Kurniawan	Hadir Present
			Maximianus Puguh Djiwanto	Hadir Present

22Tabel Rapat Dewan Komisaris
Board of Commissioners Meetings

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Attendance
11	Rabu, 3 September 2025 Wednesday, September 3, 2025	Pembahasan Permohonan Tanggapan Tertulis atas Tindak Lanjut Kajian Restrukturisasi PT Pelabuhan Indonesia Investama (PII). Discussion of the Request for Written Response to the Follow-up to the Restructuring Study of PT Pelabuhan Indonesia Investama (PII).	Agus Suhartono	Hadir Present
			Suntana	Hadir Present
			Jodi Mahardi	Hadir Present
			Andus Winarno	Hadir Present
			Elwi Danil	Hadir Present
			Rakhman Fuady Kurniawan	Hadir Present
			Maximianus Puguh Djiwanto	Hadir Present
12	Rabu, 3 September 2025 Wednesday, September 3, 2025	Pembahasan tindaklanjut Skema Kerja Sama PT Andhahanesa Abadi. Discussion of the follow-up to PT Andhahanesa Abadi Cooperation Scheme.	Agus Suhartono	Hadir Present
			Suntana	Hadir Present
			Jodi Mahardi	Hadir Present
			Andus Winarno	Hadir Present
			Elwi Danil	Hadir Present
			Rakhman Fuady Kurniawan	Hadir Present
			Maximianus Puguh Djiwanto	Hadir Present
13	Senin, 15 September 2025 Monday, September 15, 2025	Pembahasan Lanjutan atas Kajian Restrukturisasi PT Pelabuhan Indonesia Investama (PII). Further Discussion on the Restructuring Study of PT Pelabuhan Indonesia Investama (PII).	Agus Suhartono	Hadir Present
			Suntana	Hadir Present
			Jodi Mahardi	Hadir Present
			Andus Winarno	Hadir Present
			Elwi Danil	Hadir Present
			Rakhman Fuady Kurniawan	Hadir Present
			Maximianus Puguh Djiwanto	Hadir Present

22Tabel Rapat Dewan Komisaris
Board of Commissioners Meetings

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Attendance
14	Jum'at, 26 September 2025 Friday, September 26, 2025	Pembahasan Laporan Manajemen Bulan Agustus 2025; • Pembahasan Usulan Penghapusan Aset Tetap Conveyor B Regional 2 Cabang Pelabuhan Bengkulu; • *Update* Profil Risiko per September 2025; • *Update* progress kegiatan Tata Kelola s.d. September 2025; • Rencana Kerja Sama dengan AKR di Pelabuhan Panjang & Banten; Discussion of the August 2025 Management Report; • Discussion of the Proposal to Write Off Conveyor B Fixed Assets, Regional 2, Bengkulu Port Branch; • Risk Profile Update as of September 2025; • Update on Governance Activity Progress as of September 2025; • Collaboration Plan with AKR at Panjang & Banten Ports;	Agus Suhartono	Hadir Present
			Suntana	Hadir Present
			Jodi Mahardi	Hadir Present
			Andus Winarno	Hadir Present
			Elwi Danil	Hadir Present
			Rakhman Fuady Kurniawan	Hadir Present
			Maximianus Puguh Djiwanto	Hadir Present
			Agus Suhartono	Hadir Present
15	Selasa, 30 September 2025 Tuesday, September 30, 2025	Pengambilan Keputusan Jabatan Direksi PT Pelindo (Persero); • Hal-hal strategis lainnya. Decision-Making for the Position of Board of Directors of PT Pelindo (Persero); • Other strategic matters.	Agus Suhartono	Hadir Present
			Suntana	Hadir Present
			Jodi Mahardi	Hadir Present
			Andus Winarno	Hadir Present
			Elwi Danil	Hadir Present
			Rakhman Fuady Kurniawan	Hadir Present
			Maximianus Puguh Djiwanto	Hadir Present
			Agus Suhartono	Hadir Present

22Tabel Rapat Dewan Komisaris
Board of Commissioners Meetings

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Attendance
16	Selasa, 14 Oktober 2025 Tuesday, October 14, 2025	Pembahasan Permohonan Persetujuan Penghapusan Aset Tetap Conveyor B Regional 2 Cabang Pelabuhan Bengkulu Discussion of the Application for Approval to Write Off Fixed Assets from Conveyor B, Regional 2, Bengkulu Port Branch	Agus Suhartono	Hadir Present
			Suntana	Hadir Present
			Jodi Mahardi	Hadir Present
			Andus Winarno	Hadir Present
			Elwi Danil	Hadir Present
			Rakhman Fuady Kurniawan	Hadir Present
			Maximianus Puguh Djiwanto	Hadir Present
			Agus Suhartono	Hadir Present
17	Rabu, 22 Oktober 2025 Wednesday, October 22, 2025	Pembahasan Penyampaian Update Kegiatan Direktorat SDM; Isu-Isu Strategis di Bidang Strategi, Pengeloaan, dan Layanan SDM; serta hal-hal lainnya yang bersifat strategis Discussion on Submitting Updates on HC Directorate Activities; Strategic Issues in the Field of HC Strategy, Management, and Services; and Other Strategic Matters	Agus Suhartono	Hadir Present
			Suntana	Hadir Present
			Jodi Mahardi	Hadir Present
			Andus Winarno	Hadir Present
			Elwi Danil	Hadir Present
			Rakhman Fuady Kurniawan	Hadir Present
			Maximianus Puguh Djiwanto	Hadir Present
			Agus Suhartono	Hadir Present
18	Selasa, 28 Oktober 2025 Tuesday, October 28, 2025	Analisa Laporan Manajemen Bulan September 2025; • *Update* Profil Risiko TW III 2025; • *Update* Permohonan Persetujuan Kerjasama Pemanfaatan Lahan; • *Update* KNR atas Pengawasan Aspek SDM dan Perizinan Proyek-Proyek Strategis; • Hal-hal strategis lainnya. Analysis of the September 2025 Management Report; • Update on the Risk Profile for Q3 2025; • Update on the Application for Approval of Land Utilization Cooperation; • Update on NRC on the Supervision of Human Capital and Licensing Aspects of Strategic Projects; • Other strategic matters.	Agus Suhartono	Hadir Present
			Suntana	Hadir Present
			Jodi Mahardi	Hadir Present
			Andus Winarno	Hadir Present
			Elwi Danil	Hadir Present
			Rakhman Fuady Kurniawan	Hadir Present
			Maximianus Puguh Djiwanto	Hadir Present
			Agus Suhartono	Hadir Present

22Tabel Rapat Dewan Komisaris
Board of Commissioners Meetings

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Attendance
19	Kamis, 20 November 2025 Thursday, November 20, 2025	Analisa Laporan Manajemen Bulan Oktober 2025; • *Update* Permohonan Persetujuan Kerjasama Pemanfaatan Lahan; • Laporan Kunjungan Kerja Dewan Komisaris (Surabaya, Pontianak, dan Terminal Kijing); • *Update* Usulan Penyesuain KPI Direksi Individual dan Group sehubungan dengan adanya Perubahan SOTK Kantor Pusat Tahun 2025; • Permohonan Persetujuan Pembagian Dividen Interim dan Tanggapan Tertulis atas Pelepasan Saham pada PT Pertamina Bina Medika IHC kepada PT Danantara Asset Management (Persero); • Hal-hal strategis lainnya, Analysis of the October 2025 Management Report; • Update on the Application for Approval of Land Utilization Cooperation; • Report on Board of Commissioners' Working Visit (Surabaya, Pontianak, and Kijing Terminal); • Update on the Proposal for Adjustment of the Directors' Individual and Group KPIs in Relation to the Change in the Head Office's SOTK in 2025; • Request for Approval of Interim Dividend Distribution and Written Response to the Disposal of Shares in PT Pertamina Bina Medika IHC to PT Danantara Asset Management (Persero); • Other strategic matters.	Agus Suhartono	Hadir Present
			Suntana	Hadir Present
			Jodi Mahardi	Hadir Present
			Andus Winarno	Hadir Present
			Elwi Danil	Hadir Present
			Rakhman Fuady Kurniawan	Hadir Present
			Maximianus Puguh Djiwanto	Hadir Present
			Agus Suhartono	Hadir Present
20	Senin, 15 Desember 2025 Monday, December 15, 2025	Pembahasan Usulan RKAP Tahun 2026; • Hal-hal strategis lainnya. Discussion of the Proposed 2026 Work Plan and Budget (RKAP); • Other strategic matters.	Agus Suhartono	Hadir Present
			Suntana	Hadir Present
			Jodi Mahardi	Hadir Present
			Andus Winarno	Hadir Present
			Elwi Danil	Hadir Present
			Rakhman Fuady Kurniawan	Hadir Present
			Maximianus Puguh Djiwanto	Hadir Present
			Agus Suhartono	Hadir Present

22Tabel Rapat Dewan Komisaris
Board of Commissioners Meetings

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Kehadiran Attendance
21	Selasa, 16 Desember 2025 Tuesday, December 16, 2025	Analisa Laporan Manajemen Bulan Oktober 2025; • Hal-hal strategis lainnya Analysis of the October 2025 Management Report; • Other strategic matters	Agus Suhartono	Hadir Present
			Suntana	Hadir Present
			Jodi Mahardi	Hadir Present
			Andus Winarno	Hadir Present
			Elwi Danil	Hadir Present
			Rakhman Fuady Kurniawan	Hadir Present
			Maximianus Puguh Djiwanto	Hadir Present
			Agus Suhartono	Hadir Present

RAPAT DEWAN KOMISARIS DENGAN DIREKSI

BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS JOINT MEETINGS

RENCANA RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS MEETING PLAN

No	Bulan Month	Agenda
1	Januari 2025	• Pembahasan hasil rapat terdahulu • Pembahasan kinerja unaudited tahun 2024 • Laporan progres kinerja masing-masing Direktorat • Pembahasan Rencana Implementasi RKAP 2025 • Pembahasan hal-hal strategis lainnya • Discussion of the results of previous meeting • Discussion of unaudited performance for 2024 • Performance progress reports for each Directorate • Discussion of the 2025 RKAP Implementation Plan • Discussion of other strategic matters
2	Februari 2025	• Pembahasan hasil rapat terdahulu • Pembahasan kinerja bulan Januari 2025 • Laporan progres kinerja masing-masing Direktorat • Pembahasan Hasil Audit Tahun Buku 2024 • Pembahasan Hasil Asesmen GCG Tahun Buku 2024 • Pembahasan hal-hal strategis lainnya • Discussion of the results of previous meeting • Discussion of the performance of January 2025 • Performance progress report for each Directorate • Discussion of the Audit Results for Fiscal Year 2024 • Discussion of the GCG Assessment Results for Fiscal Year 2024 • 6. Discussion of other strategic matters

No	Bulan Month	Agenda
3	Maret 2025	• Pembahasan hasil rapat terdahulu • Pembahasan kinerja bulan Februari 2025 • Laporan progres kinerja masing-masing Direktorat • Pembahasan hasil temuan audit dan tindak lanjutnya • Pembahasan Rencana Penunjukan Auditor Eksternal (KAP) Tahun Buku 2025 • Pembahasan Persiapan RUPS Pengesahan Laporan Tahunan 2024 • Pembahasan hal-hal strategis lainnya • Discussion of the results of previous meeting • Discussion of the performance of February 2025 • Performance progress report for each Directorate • Discussion of audit findings and follow-up • Discussion of the Planned Appointment of External Auditor (KAP) for Fiscal Year 2025 • Discussion of Preparation for the GMS for Ratification of 2024 Annual Report • Discussion of other strategic matters
4	April 2025	• Pembahasan hasil rapat terdahulu • Laporan progres kinerja masing-masing Direktorat • Pembahasan Laporan Manajemen Triwulan I/2025 • Pembahasan hasil RUPS Pengesahan Laporan Tahunan 2024 • Pembahasan hal-hal strategis lainnya • Discussion of the results of previous meeting • Performance progress report for each Directorate • Discussion of the Management Report for the First Quarter of 2025 • Discussion of the results of the GMS for Ratification of the 2024 Annual Report • Discussion of other strategic matters • of other strategic matters
5	Mei 2025	• Pembahasan hasil rapat terdahulu • Pembahasan kinerja bulan April 2025 • Laporan progres kinerja masing-masing Direktorat • Pembahasan hal-hal strategis lainnya • Discussion of the results of previous meeting • Discussion of the performance for April 2025 • Performance progress report for each Directorate • Discussion
6	Juni 2025	• Pembahasan hasil rapat terdahulu • Pembahasan kinerja bulan Mei 2025 • Laporan progres kinerja masing-masing Direktorat • Pembahasan hal-hal strategis lainnya • Discussion of the results of previous meeting • Discussion of the performance for May 2025 • Performance progress report for each Directorate • Discussion of other strategic matters
7	Juli 2025	• Pembahasan hasil rapat terdahulu • Pembahasan Laporan Manajemen Semester I/2025 • Laporan progres kinerja masing-masing Direktorat • Telaah atas pelaksanaan RKAP 2025 • Pembahasan hal-hal strategis lainnya • Discussion of the results of previous meeting • Discussion of the Management Report for the First Half of 2025 • Performance progress report for each Directorate • Review of the implementation of the 2025 Work Plan and Budget (RKAP) • Discussion of other strategic matters

No	Bulan Month	Agenda
8	Agustus 2025	• Pembahasan hasil rapat terdahulu • Pembahasan kinerja bulan Juli 2025 • Laporan progres kinerja masing-masing Direktorat • Pembahasan hal-hal strategis lainnya • Discussion of the results of previous meeting • Discussion of the performance of July 2025 • Progress report on the performance of each Directorate • Discussion of other strategic matters
9	September 2025	• Pembahasan hasil rapat terdahulu • Pembahasan kinerja bulan Agustus 2025 • Laporan progres kinerja masing-masing Direktorat • Pembahasan Usulan RKAP 2025 • Pembahasan hal-hal strategis lainnya • Discussion of the results of previous meeting • Discussion of the performance of August 2025 • Progress report on the performance of each Directorate • Discussion of the proposed 2025 Work Plan and Budget (RKAP) • Discussion of other strategic matters
10	Oktober 2025	• Pembahasan hasil rapat terdahulu • Pembahasan Laporan Manajemen Triwulan III/2025 • Laporan progres kinerja masing-masing Direktorat • Pembahasan Usulan RKAP 2025 • Pembahasan hal-hal strategis lainnya • Discussion of the results of previous meeting • Discussion of the Management Report for Quarter III/2025 • Progress report on the performance of each Directorate • Discussion of the proposed 2025 Work Plan and Budget • Discussion of other strategic matters
11	November 2025	• Pembahasan hasil rapat terdahulu • Pembahasan kinerja bulan Oktober 2025 • Laporan progres kinerja masing-masing Direktorat • Persiapan RUPS Pengesahan RKAP 2025 • Pembahasan hal-hal strategis lainnya • Discussion of the results of previous meeting • Discussion of the performance of October 2025 • Progress report on the performance of each Directorate • Preparation for the GMS for the ratification of the 2025 Work Plan and Budget • Discussion of other strategic matters Other strategic matters
12	Desember 2025	• Pembahasan hasil rapat terdahulu • Pembahasan kinerja bulan November 2025 • Laporan progres kinerja masing-masing Direktorat • Pembahasan hal-hal strategis lainnya • Discussion of the results of previous meeting • Discussion of performance for November 2025 • Report on the performance progress of each Directorate • Discussion of other strategic matters

REALISASI RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Sepanjang tahun 2025, agenda, tanggal dan peserta Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi adalah sebagai berikut.

REALIZATION OF BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS MEETINGS

Throughout 2025, the agenda, dates, and participants of Board of Commissioners and Board of Directors meetings are as follows.

Tabel Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi
Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meetings

No	Tanggal Date	Agenda Agenda	Peserta Rapat Dewan Komisaris Board of Commissioners Meeting Participants	Kehadiran Attendance	Peserta Rapat Direksi Board of Directors Meeting Participants	Kehadiran Attendance
1	Kamis, 30 Januari 2025 Thursday, January 30 2025	Pembahasan Laporan Manajemen Tahun 2024 (Unaudited); • Pembahasan Hasil Self Assessment Peringkat Komposit Risiko TW 4 Tahun 2024; • Hal-hal Strategis Lainnya. Discussion of the 2024 Management Report (Unaudited); • Discussion of the Composite Risk Rating Self-Assessment Results for Q4 2024; • Other Strategic Matters.	Agus Suhartono	Hadir Present	Arif Suhartono	Hadir Present
			Suntana	Hadir Present	Hambra	Hadir Present
			Jodi Mahardi	Hadir Present	Mega Satria	Hadir Present
			Heru Sukanto	Hadir Present	Ihsanuddin Usman	Tidak Hadir Absent
			Andus Winarno	Hadir Present	Prasetyo	Hadir Present
			Elwi Danil	Hadir Present	Boy Robyanto	Hadir Present
			Rakhman Fuady Kurniawan	Hadir Present	Putut Sri Muljanto	Tidak Hadir Absent
2	Jum'at, 21 Februari 2025 Friday, February 21 2025	Pembahasan Laporan Manajemen Bulan Januari 2025; • *Update* Penanganan Kemacetan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Mitigasi Risikonya; • Hal-hal Strategis Lainnya. Discussion of the January 2025 Management Report; • Update on Congestion Management at Tanjung Priok Port and Risk Mitigation; • Other Strategic Matters.	Agus Suhartono	Hadir Present	Arif Suhartono	Hadir Present
			Suntana	Hadir Present	Hambra	Hadir Present
			Jodi Mahardi	Hadir Present	Mega Satria	Tidak Hadir Absent
			Heru Sukanto	Hadir Present	Ihsanuddin Usman	Hadir Present
			Andus Winarno	Hadir Present	Prasetyo	Hadir Present
			Elwi Danil	Hadir Present	Boy Robyanto	Hadir Present
			Rakhman Fuady Kurniawan	Hadir Present	Putut Sri Muljanto	Hadir Present

Tabel Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi
Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meetings

No	Tanggal Date	Agenda Agenda	Peserta Rapat Dewan Komisaris Board of Commissioners Meeting Participants	Kehadiran Attendance	Peserta Rapat Direksi Board of Directors Meeting Participants	Kehadiran Attendance
3	Senin, 24 Maret 2025 Monday, March 24 2025	Pembahasan Laporan Manajemen Bulan Februari 2025; • Hal-hal Strategis Lainnya. Discussion of the February 2025 Management Report; • Other Strategic Matters.	Agus Suhartono	Hadir Present	Arif Suhartono	Hadir Present
			Suntana	Hadir Present	Hambra	Hadir Present
			Jodi Mahardi	Hadir Present	Mega Satria	Hadir Present
			Heru Sukanto	Hadir Present	Ihsanuddin Usman	Hadir Present
			Andus Winarno	Hadir Present	Prasetyo	Hadir Present
			Elwi Danil	Tidak Hadir Absent	Boy Robyanto	Hadir Present
			Rakhman Fuady Kurniawan	Hadir Present	Putut Sri Muljanto	Hadir Present
4	Rabu, 23 April 2025 Wednesday, April 23, 2025	Pembahasan Laporan Manajemen Bulan Maret 2025; • *Update* isu dan antisipasi permasalahan kemacetan di Pelabuhan Tanjung Priok; • Hal-hal Strategis Lainnya. Discussion of the March 2025 Management Report; • Update on issues and anticipation of congestion problems at Tanjung Priok Port; • Other Strategic Matters.	Agus Suhartono	Hadir Present	Arif Suhartono	Hadir Present
			Suntana	Hadir Present	Hambra	Hadir Present
			Jodi Mahardi	Hadir Present	Mega Satria	Hadir Present
			Heru Sukanto	Hadir Present	Ihsanuddin Usman	Hadir Present
			Andus Winarno	Hadir Present	Prasetyo	Hadir Present
			Elwi Danil	Hadir Present	Boy Robyanto	Hadir Present
			Rakhman Fuady Kurniawan	Hadir Present	Putut Sri Muljanto	Hadir Present
5	Selasa, 27 Mei 2025 Tuesday, May 27, 2025	Pembahasan Laporan Manajemen Bulan April 2025; • Pembahasan Laporan *Audited* PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Tahun Buku 2024; • Hal-hal strategis lainnya. Discussion of the April 2025 Management Report; • Discussion of the Audited Report of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) for the 2024 Fiscal Year; • Other Strategic Matters.	Agus Suhartono	Hadir Present	Arif Suhartono	Hadir Present
			Suntana	Hadir Present	Hambra	Hadir Present
			Jodi Mahardi	Hadir Present	Mega Satria	Hadir Present
			Heru Sukanto	Hadir Present	Ihsanuddin Usman	Hadir Present
			Andus Winarno	Hadir Present	Prasetyo	Hadir Present
			Elwi Danil	Hadir Present	Boy Robyanto	Hadir Present
			Rakhman Fuady Kurniawan	Hadir Present	Putut Sri Muljanto	Hadir Present

Tabel Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi
Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meetings

No	Tanggal Date	Agenda Agenda	Peserta Rapat Dewan Komisaris Board of Commissioners Meeting Participants	Kehadiran Attendance	Peserta Rapat Direksi Board of Directors Meeting Participants	Kehadiran Attendance
6	Selasa, 24 Juni 2025 Tuesday, June 24, 2025	Pembahasan Laporan Manajemen Bulan Mei 2025; • Hal-hal strategis lainnya. Discussion of the May 2025 Management Report; • Other Strategic Matters.	Agus Suhartono	Hadir Present	Arif Suhartono	Hadir Present
			Suntana	Hadir Present	Hambra	Hadir Present
			Jodi Mahardi	Hadir Present	Mega Satria	Hadir Present
			Heru Sukanto	Hadir Present	Ihsanuddin Usman	Hadir Present
			Andus Winarno	Hadir Present	Prasetyo	Hadir Present
			Elwi Danil	Hadir Present	Boy Robyanto	Hadir Present
			Rakhman Fuady Kurniawan	Hadir Present	Putut Sri Muljanto	Hadir Present
7	Kamis, 24 Juli 2025 Thursday, July 24, 2025	Pembahasan Laporan Manajemen s.d Bulan Juni 2025; • Hal-hal strategis lainnya. Discussion of the Management Report until June 2025; • Other strategic matters.	Agus Suhartono	Hadir Present	Arif Suhartono	Hadir Present
			Suntana	Hadir Present	Hambra	Hadir Present
			Jodi Mahardi	Hadir Present	Mega Satria	Hadir Present
			Andus Winarno	Hadir Present	Boy Robyanto	Hadir Present
			Elwi Danil	Hadir Present	Putut Sri Muljanto	Hadir Present
			Rakhman Fuady Kurniawan	Hadir Present	Dwi Fatan Lilyana	Hadir Present
			Maximianus Puguh Djiwanto	Hadir Present	Drajat Sulistyo	Hadir Present
8	Rabu, 27 Agustus 2025 Wednesday, August 27, 2025	Pembahasan Laporan Manajemen s.d Bulan Juli 2025; • Hal-hal strategis lainnya. Discussion of the Management Report until July 2025; • Other strategic matters.	Agus Suhartono	Hadir Present	Arif Suhartono	Hadir Present
			Suntana	Hadir Present	Hambra	Hadir Present
			Jodi Mahardi	Hadir Present	Mega Satria	Hadir Present
			Andus Winarno	Hadir Present	Boy Robyanto	Hadir Present
			Elwi Danil	Hadir Present	Putut Sri Muljanto	Hadir Present
			Rakhman Fuady Kurniawan	Hadir Present	Dwi Fatan Lilyana	Hadir Present
			Maximianus Puguh Djiwanto	Hadir Present	Drajat Sulistyo	Hadir Present

Tabel Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi
Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meetings

No	Tanggal Date	Agenda Agenda	Peserta Rapat Dewan Komisaris Board of Commissioners Meeting Participants	Kehadiran Attendance	Peserta Rapat Direksi Board of Directors Meeting Participants	Kehadiran Attendance
9	Jum'at, 26 September 2025 Friday, September 26, 2025	Pembahasan Laporan Manajemen s.d Bulan Agustus 2025; • Hal-hal strategis lainnya. Discussion of the Management Report until August 2025; • Other strategic matters.	Agus Suhartono	Hadir Present	Arif Suhartono	Hadir Present
			Suntana	Hadir Present	Boy Robyanto	Hadir Present
			Jodi Mahardi	Hadir Present	Putut Sri Muljanto	Hadir Present
			Elwi Danil	Hadir Present	Dwi Fatan Lilyana	Hadir Present
			Rakhman Fuady Kurniawan	Hadir Present	Drajat Sulistyo	Hadir Present
			Maximianus Puguh Djiwanto	Hadir Present	Bachtiar Soeria Atmadja	Hadir Present
			Arief Poyuono	Hadir Present	Hosadi Apriza Putra	Hadir Present
			Ilhamsyah	Hadir Present	Muhammad Suriawan Wakan	Hadir Present
10	Selasa, 28 Oktober 2025 Tuesday, October 28, 2025	Pembahasan Laporan Manajemen Bulan September 2025; • Rencana Pendanaan Tahun 2025; • Pembahasan Konsep RKAP Tahun 2026; • Hal-hal strategis lainnya. Discussion of the September 2025 Management Report; • 2025 Funding Plan; • Discussion of the 2026 RKAP Concept; • Other strategic matters.	Agus Suhartono	Hadir Present	Arif Suhartono	Hadir Present
			Suntana	Hadir Present	Boy Robyanto	Hadir Present
			Jodi Mahardi	Hadir Present	Putut Sri Muljanto	Hadir Present
			Elwi Danil	Hadir Present	Dwi Fatan Lilyana	Hadir Present
			Rakhman Fuady Kurniawan	Hadir Present	Drajat Sulistyo	Hadir Present
			Maximianus Puguh Djiwanto	Hadir Present	Bachtiar Soeria Atmadja	Hadir Present
			Arief Poyuono	Hadir Present	Hosadi Apriza Putra	Hadir Present
			Ilhamsyah	Hadir Present	Muhammad Suriawan Wakan	Hadir Present

Tabel Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi
Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meetings

No	Tanggal Date	Agenda Agenda	Peserta Rapat Dewan Komisaris Board of Commissioners Meeting Participants	Kehadiran Attendance	Peserta Rapat Direksi Board of Directors Meeting Participants	Kehadiran Attendance
11	Kamis, 20 November 2025 Thursday, November 20, 2025	Pembahasan Laporan Manajemen Bulan Oktober 2025; • Hal-hal strategis lainnya. Discussion of the October 2025 Management Report; • Other strategic matters.	Agus Suhartono	Hadir Present	Arif Suhartono	Hadir Present
			Suntana	Hadir *Present*	Boy Robyanto	Hadir Present
			Jodi Mahardi	Hadir *Present*	Putut Sri Muljanto	Hadir Present
			Elwi Danil	Hadir *Present*	Dwi Fatan Lilyana	Hadir Present
			Rakhman Fuady Kurniawan	Hadir *Present*	Drajat Sulistyo	Hadir Present
			Maximianus Puguh Djiwanto	Hadir *Present*	Bachtiar Soeria Atmadja	Hadir Present
			Arief Poyuono	Hadir *Present*	Hosadi Apriza Putra	Hadir Present
			Ilhamsyah	Hadir *Present*	Muhammad Suriawan Wakan	Hadir Present
12	Selasa, 16 Desember 2025 Tuesday, December 16, 2025	Pembahasan Laporan Manajemen Bulan November 2025; • Hal-hal strategis lainnya. Discussion of the November 2025 Management Report; • Other strategic matters.	Agus Suhartono	Hadir *Present*	Arif Suhartono	Hadir Present
			Suntana	Hadir *Present*	Boy Robyanto	Hadir Present
			Jodi Mahardi	Hadir *Present*	Putut Sri Muljanto	Hadir Present
			Elwi Danil	Hadir *Present*	Dwi Fatan Lilyana	Hadir Present
			Rakhman Fuady Kurniawan	Hadir *Present*	Drajat Sulistyo	Hadir Present
			Maximianus Puguh Djiwanto	Hadir *Present*	Bachtiar Soeria Atmadja	Hadir Present
			Arief Poyuono	Hadir *Present*	Hosadi Apriza Putra	Hadir Present
			Ilhamsyah	Hadir *Present*	Muhammad Suriawan Wakan	Hadir Present

FREKUENSI DAN KEHADIRAN RAPAT DEWAN KOMISARIS

FREQUENCY AND ATTENDANCE OF BOARD OF COMMISSIONERS' MEETINGS

Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat Dewan Komisaris
Meeting Frequency and Attendance of Board of Commissioners

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Dewan Komisaris Board of Commissioners Meeting			Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi Joint Meeting of Board of Commissioners and Board of Directors			RUPS GMS		
		Jumlah dan Persentasi Kehadiran Number and Percentage of Attendance			Jumlah dan Persentasi Kehadiran Number and Percentage of Attendance			Jumlah dan Persentasi Kehadiran Number and Percentage of Attendance		
		Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Percentage	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Percentage	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Percentage
Agus Suhartono	Komisaris Utama/ Independen President/ Independent Commissioner	21	21	100%	12	12	100%	2	2	100%
Suntana	Wakil Komisaris Utama Deputy President Commissioner	21	21	100%	12	12	100%	2	2	100%
Heru Sukanto*	Komisaris Independen Independent Commissioner	8	8	100%	6	6	100%	2	2	100%
Jodi Mahardi	Komisaris Commissioner	21	21	100%	12	12	100%	2	2	100%
Andus Winarno**	Komisaris Commissioner	13	13	100%	8	8	100%	2	2	100%
Elwi Danil	Komisaris Commissioner	21	20	95%	12	11	91%	2	2	100%
Rakhman Fuadhy	Komisaris Independen Independent Commissioner	21	21	100%	12	12	100%	2	2	100%
Maximianus Puguh Djiwanto***	Komisaris Independen Independent Commissioner	13	13	100%	6	6	100%	-	-	-
Arief Poyuono****	Komisaris Independen Independent Commissioner	8	8	100%	4	4	100%	-	-	-
Ilhamsyah****	Komisaris Commissioner	8	8	100%	4	4	100%	-	-	-

*Berhenti menjabat sejak 25 Juni 2025
**Berhenti menjabat sejak 19 September 2025
***Mulai menjabat sejak 25 Juni 2025
****Mulai menjabat sejak 19 September 2025
*Ceased to hold office as of June 25, 2025
**Ceased to hold office as of September 19, 2025
***Assumed office as of June 25, 2025
****Assumed office as of September 19, 2025

PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Peningkatan kapabilitas dinilai penting agar Dewan Komisaris dapat selalu memperbarui informasi tentang perkembangan terkini dari *core business* Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan terkait program peningkatan kapabilitas bagi Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Program peningkatan kapabilitas dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja Dewan Komisaris;
2. Rencana untuk melaksanakan program peningkatan kapabilitas harus dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris;
3. Setiap tahun masing-masing anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti salah satu pelatihan dengan topik manajemen risiko, fraud, bisnis, kegiatan usaha korporasi, hukum,kepatuhan, keuangan, akuntansi dan/atau audit;
4. Mengikuti pelatihan paling sedikit berjumlah 20 (dua puluh) jam pelatihan dalam satu tahun;
5. Pelatihan yang diikuti merupakan PPL yang diselenggarakan lembaga profesi, akreditasi, dan/atau lembaga pelatihan milik atau dikendalikan oleh BUMN;
6. Dewan Komisaris wajib mengikuti paling sedikit 1 (satu) sertifikasi antara lain bidang bisnis, kegiatan usaha korporasi, hukum, manajemen risiko, kepatuhan, keuangan, akuntansi;
7. Sertifikasi diterbitkan oleh dewan sertifikasi/regulator/ organisasi profesi terkait yang diakui secara nasional dan/atau internasional;
8. Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan bertanggungjawab untuk membuat laporan tentang pelaksanaan program peningkatan kapabilitas. Laporan tersebut disampaikan kepada Dewan Komisaris, selambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penyelenggaraan pelaksanaan program tersebut.

Realisasi program peningkatan kapabilitas yang diikuti oleh Dewan Komisaris sepanjang tahun 2025 dijabarkan dalam tabel berikut ini:

BOARD OF COMMISSIONERS TRAINING AND/ OR COMPETENCY DEVELOPMENT

Capability improvement is deemed important to enable the Board of Commissioners to update their knowledge on the latest developments of the Company's core business, to anticipate problems that arise in the future for the sustainability and progress of the Company. The provisions regarding Board of Commissioners capability improvement program are as follows:

1. The capability improvement program is carried out to improve the work effectiveness of Board of Commissioners.
2. The capability improvement program should be included in the Board of Commissioners' Work Plan and Budget;
3. Each year, each member of Board of Commissioners is required to attend one of the trainings on the topics of risk management, fraud, business, corporate business activities, law, compliance, finance, accounting and/ or audit;
4. Participate in training at least totaling 20 (twenty) hours of training in one year;
5. The training attended is PPL organized by professional institutions, accreditation, and/or training institutions owned or controlled by SOEs;
6. The Board of Commissioners must follow at least 1 (one) certification, including in the fields of business, corporate business activities, law, risk management, compliance, finance, accounting;
7. Certification is issued by a certification board/regulator/ relevant professional organization that is recognized nationally and/or internationally;
8. The member of Board of Commissioners concerned is responsible for making a report on the implementation of capability improvement program. The report shall be submitted to the Board of Commissioners, no later than 30 (thirty) days after the date of program implementation.

The realization of capability improvement program attended by Board of Commissioners throughout 2025 is outlined in the following table:

Nama Name	**Jabatan** Position	**Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan** Type and Subject of Training and Competency Development	**Waktu dan Tempat** Pelaksanaan Date and Location	**Penyelenggara** Organizer
Agus Suhartono	Komisaris Utama/ Independen President/Independent Commissioner	Sertifikasi CAFG (Certified Anti Fraud Governance) CAFG (Certified Anti-Fraud Governance) Certification	Kamis-Jumat, 18-19 September 2025, Thursday-Friday, September 18-19, 2025	PT GRC Management

Nama Name	**Jabatan** Position	**Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan** Type and Subject of Training and Competency Development	**Waktu dan Tempat** Pelaksanaan Date and Location	**Penyelenggara** Organizer
Suntana	Wakil Komisaris Utama Deputy President Commissioner	Sertifikasi CAFG (Certified Anti Fraud Governance) CAFG (Certified Anti-Fraud Governance) Certification	Kamis-Jumat, 18-19 September 2025, Thursday-Friday, September 18-19, 2025	PT GRC Management
		Executive Program For Commisioners: Excellence For The Future Of Maritime & Logistics Industry PT Pelindo (Persero)	Kamis-Jum'at, 30-31 Oktober 2025 Thursday-Friday, October 30-31, 2025	PT PMLI
Heru Sukanto*	Komisaris Independen Independent Commissioner	-	-	-
Jodi Mahardi	Komisaris Commissioner	Sertifikasi CAFG (Certified Anti Fraud Governance) CAFG (Certified Anti-Fraud Governance) Certification	Kamis-Jumat, 18-19 September 2025, Thursday-Friday, September 18-19, 2025	PT GRC Management
Andus Winarno**	Komisaris Commissioner	Sertifikasi CAFG (Certified Anti Fraud Governance) CAFG (Certified Anti-Fraud Governance) Certification	Kamis-Jumat, 18-19 September 2025, Thursday-Friday, September 18-19, 2025	PT GRC Management
Elwi Danil	Komisaris Commissioner	Sertifikasi CAFG (Certified Anti Fraud Governance) CAFG (Certified Anti-Fraud Governance) Certification	Kamis-Jumat, 18-19 September 2025, Thursday-Friday, September 18-19, 2025	PT GRC Management
		Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko XI 11th National Conference of Risk Management Professionals	Kamis-Jumat, 27-28 November 2025 Thursday-Friday, November 27-28, 2025	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSPMR)
Rakhman Fuadhy	Komisaris Independen Independent Commissioner	Pelatihan Seri-16 Komisaris Profesional (Menjadi Komisaris yang Kompeten dan bertanggungjawab) Professional Commissioner Training Series 16 (Becoming a Competent and Responsible Commissioner)	11-12 Juni 2025, Hotel Mulia Senayan, June 11-12, 2025, Hotel Mulia Senayan,	Inti Pesan "knowledge for success"
		Executive Program For Commisioners: Excellence For The Future Of Maritime & Logistics Industry PT Pelindo (Persero)	Kamis-Jum'at, 30-31 Oktober 2025 Thursday-Friday, October 30-31, 2025	PT PMLI
Maximianus Puguh Djiwanto***	Komisaris Independen Independent Commissioner	Sertifikasi CAFG (Certified Anti Fraud Governance) CAFG (Certified Anti-Fraud Governance) Certification	Kamis-Jumat, 18-19 September 2025, Thursday-Friday, September 18-19, 2025	PT GRC Management
		Executive Program For Commisioners: Excellence For The Future Of Maritime & Logistics Industry PT Pelindo (Persero)	Kamis-Jum'at, 30-31 Oktober 2025 Thursday-Friday, October 30-31, 2025	PT PMLI

Nama Name	Jabatan Position	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan Type and Subject of Training and Competency Development	Waktu dan Tempat Pelaksanaan Date and Location	Penyelenggara Organizer
Arief Poyuono****	Komisaris Independen Independent Commissioner	Executive Program For Commisioners: Excellence For The Future Of Maritime & Logistics Industry PT Pelindo (Persero)	Kamis-Jum'at, 30-31 Oktober 2025 Thursday-Friday, October 30-31, 2025	PT PMLI
		Sertifikasi Nasional Sertified Risk Governance Professional ATKRT (Level IV) National Certification of Certified Risk Governance Professional ATKRT (Level IV)	11-12 Desember 2025 dan 17 Desember 2025 online December 11-12, 2025 and December 17, 2025 online	PT RAP Indonesia (LSPMR)
Ilhamsyah****	Komisaris Commissioner	Executive Program For Commisioners: Excellence For The Future Of Maritime & Logistics Industry PT Pelindo (Persero)	Kamis-Jum'at, 30-31 Oktober 2025 Thursday-Friday, October 30-31, 2025	PT PMLI
		Executive Program For Commisioners: Excellence For The Future Of Maritime & Logistics Industry PT Pelindo (Persero)	Kamis-Jum'at, 30-31 Oktober 2025 Thursday-Friday, October 30-31, 2025	PT PMLI
		Sertifikasi Nasional Sertified Risk Governance Professional ATKRT (Level IV) National Certification of Certified Risk Governance Professional ATKRT (Level IV)	11-12 Desember 2025 dan 17 Desember 2025 online December 11-12, 2025 and December 17, 2025 online	PT RAP Indonesia (LSPMR)

*Berhenti menjabat sejak 25 Juni 2025
**Berhenti menjabat sejak 19 September 2025
***Mulai menjabat sejak 25 Juni 2025
****Mulai menjabat sejak 19 September 2025
*Ceased to hold office as of June 25, 2025
**Ceased to hold office as of September 19, 2025
***Assumed office as of June 25, 2025
****Assumed office as of September 19, 2025

PROGRAM ORIENTASI BAGI KOMISARIS BARU

Ketentuan tentang program pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Kepada anggota Dewan Komisaris yang diangkat untuk pertama kalinya, wajib diberikan program pengenalan mengenai Perseroan.
2. Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada pada Sekretaris Perusahaan atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Perusahaan.
3. Program pengenalan meliputi:
   a. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG pada Perseroan;
   b. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko, dan masalah-masalah strategis lainnya;
   c. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit; dan

ORIENTATION PROGRAM FOR NEW BOARD OF COMMISSIONERS

The provisions regarding the orientation program for members of Board of Commissioners are as follows:

1. Members of Board of Commissioners who are appointed for the first time must be given an induction program regarding the Company.
2. The responsibility for conducting the orientation program rests with the Corporate Secretary or anyone who performs the function as the Corporate Secretary.

3. The orientation program includes:
   a. Implementation of GCG principles by the Company;
   b. An overview of the Company in relation to the objectives, nature and scope of activities, financial and operating performance, strategies, short-term and long-term business plans, competitive position, risks, and other strategic issues;
   c. Information related to delegated authority, internal and external audit, internal control systems and policies, including the Audit Committee; and

d. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal-hal lain yang tidak diperbolehkan.

4. Program pengenalan Perusahaan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke fasilitas Perusahaan dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan Perusahaan.
5. Program pengenalan Perusahaan dilaksanakan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah RUPS memutuskan pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang baru.

Pelaksanaan program orientasi bagi Komisaris baru yang diangkat pada tahun 2025 telah dilaksanakan melalui rakomdir tanggal 26 september 2025.

PELAKSANAAN TUGAS DEWAN KOMISARIS

Selama tahun 2025, Dewan Komisaris telah memberikan evaluasi. arahan, tanggapan dan persetujuan antara lain:

1. Usulan RKAP 2025
2. Evaluasi pelaksanaan RKAP Tahun 2025 dan membuat tanggapan Dewan Komisaris tentang Realisasi Triwulan I, II dan III disampaikan ke Pemegang Saham.
3. Pengawasan Penerapan Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik.
   Untuk memastikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik diterapkan di perusahaan, Dewan Komisaris melakukan monitoring dalam tindakan Direksi, seperti pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan, penghapusbukuan aset, dan kerjasama aset.
4. Evaluasi Kinerja Direksi.
5. Tanggapan atas remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.
6. Pengawasan Kepatuhan Direksi terhadap Hukum dan Peraturan Perundang-undangan.
7. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan auditor internal.
   Selama tahun 2025, pengawasan atas tindak lanjut temuan tersebut dilakukan oleh Dewan Komisaris antara lain melalui rapat koordinasi antara Komite Audit dengan SPI secara berkala (3 bulanan), kunjungan kerja ke cabang, dan rapat koordinasi dengan Direksi.
8. Pengawasan pelaksanaan audit eksternal dan mengajukan usulan auditor eksternal.
9. Selama Tahun 2025, Dewan Komisaris dan Organ Pendukung Dewan Komisaris telah melaksanakan kunjungan kerja ke Regional, Cabang-Cabang dan Anak Perusahaan baik khusus mengenai kinerja, maupun kunjungan dalam rangka kegiatan tertentu seperti pengecekan fisik aset yang akan dihapusbukukan dan dipindahtangankan.

d. Information regarding the duties and responsibilities of Board of Commissioners and Board of Directors as well as other prohibited matters.

4. The Company's orientation program can be in the form of presentations, meetings, visits to Company facilities and review of documents or other programs deemed appropriate to the Company.
5. The Company's orientation program is carried out no later than 90 (ninety) calendar days after the GMS decides on the appointment of new members of Board of Commissioners.

The orientation program for new Commissioners appointed in 2025 was held through a Board of Directors' Meeting on September 26, 2025.

IMPLEMENTATION OF BOARD OF COMMISSIONERS' DUTIES

1. Proposed 2025 Work Plan and Budget (RKAP).
2. Evaluating the implementation of 2025 Work Plan and Budget and submitting the Board's response to the Realization of Quarters I, II, and III to Shareholders.
3. Supervising the Implementation of Good Corporate Governance Principles.
   To ensure the implementation of good corporate governance principles in the company, Board of Commissioners monitors the actions of the Board of Directors, such as the appointment of Directors and Board of Commissioners of Subsidiaries, asset write-offs, and asset collaborations.
4. Evaluation of Board of Directors' Performance.
5. Responses to the remuneration of Board of Commissioners and Board of Directors.
6. Supervising Board of Directors' Compliance with Laws and Regulations.
7. Monitoring the follow-up of internal auditor audit results.
   Throughout 2025, Board of Commissioners monitorrf the follow-up of these findings, including through regular (quarterly) coordination meetings between Audit Committee and Internal Audit Unit (SPI), working visits to branches, and coordination meetings with the Board of Directors.
8. Supervising the implementation of external audits and submitting proposals for external auditors.
9. During 2025, Board of Commissioners and its supporting organs conducted working visits to regional offices, branches, and subsidiaries, both specifically regarding performance and for specific activities such as physical inspections of assets to be written off or transferred.

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian kinerja Dewan Komisaris baik secara kolegial maupun individu ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris yang akan dievaluasi secara periodik yang ketentuannya sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris memiliki kebijakan mengenai pengukuran dan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris;
2. Dewan Komisaris menetapkan indikator Pencapaian Kinerja yang disahkan RUPS setiap tahun;
3. Dewan Komisaris atau organ Dewan Komisaris melakukan penilaian atas kinerja Dewan Komisaris, menuangkan hasilnya dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris serta mencantumkan dalam Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris;
4. Dewan Komisaris melakukan evaluasi tahunan secara objektif untuk menentukan efektivitas Dewan, Komite dan setiap individu Komisaris.
5. Evaluasi tahunan pada point 4 di atas di dasarkan pada tolak ukur atau kriteria penilaian yang spesifik, terukur, dapat dicapai dan relevan;
6. Evaluasi tahunan sebagaimana dimaksud disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada RUPS.

Kriteria Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Kriteria KPI Kolegial Dewan Komisaris

1. Kontribusi terhadap capaian kinerja perusahaan
2. Ketepatan waktu penyampaian pendapat dan saran yang menjadi kewajiban Dewan Komisaris
3. Rapat dan Kunjungan Kerja Dewan Komisaris
4. Pengawasan dan arahan terhadap Direksi atas rencana dan kebijakan perusahaan
5. Efektivitas kegiatan penunjang Dewan Komisaris
6. Pengawasan dan arahan atas rencana dan pelaksanaan program TJSL

Kriteria KPI Individu Dewan Komisaris

Kategori pencapaian KPI per masing-masing Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. “Sangat Baik” apabila pencapaian KPI 100%-120%
2. “Baik” apabila pencapaian KPI 85%-99%
3. “Kurang Baik” apabila pencapaian KPI 60%-84%
4. “Tidak Baik” apabila pencapaian KPI kurang dari 60%

BOARD OF COMMISSIONERS PERFORMANCE APPRAISAL

Procedure of Board of Commissioners Performance Appraisal

The performance assessment of Board of Commissioners both individually and collegially in detail will be determined based on the Decision of Board of Commissioners which will be evaluated periodically with the following provisions:

1. Board of Commissioners has a policy on the measurement and assessment of the Board of Commissioners’ performance;
2. Board of Commissioners sets Performance Achievement indicators that are approved by the GMS every year;
3. Board of Commissioners or an organ of Board of Commissioners conducts an assessment of the Board of Commissioners’ performance, states the results in the Board of Commissioners’ Meeting Minutes and includes it in the Board of Commissioners’ Duties Implementation Report;
4. Board of Commissioners conducts an objective annual evaluation to determine the effectiveness of Board, Committee and each individual Commissioner.
5. The annual evaluation in point 4 above is based on benchmarks or assessment criteria that are specific, measurable, achievable and relevant;
6. The annual evaluation as referred to is submitted by the Board of Commissioners to the GMS.

Board of Commissioners Performance Assessment Criteria

Board of Commissioners Collegial KPI Criteria

1. Contribution to the Company’s performance achievement;
2. Timely submission of opinions and suggestions that are the obligation of Board of Commissioners;
3. Meetings and Working Visit of Board of Commissioners;
4. Supervision and direction to the Board of Directors on the Company’s plans and policies;
5. Effectiveness of supporting activities of Board of Commissioners;
6. Supervision and direction on the plan and implementation of SER program.

Board of Commissioners Individual KPI Criteria

Categories of KPI achievement per each Board of Commissioners are as follows:

1. “Very Good” if the KPI achievement is 100%-120%
2. “Good” if the KPI achievement is 85%-99%
3. “Poor” if the KPI achievement is 60%-84%
4. “Very Poor” if the KPI achievement is less than 60%

Adapun indikator penialain KPI individu Dewan Komisaris yaitu:

The individual KPI assessment indicators for Board of Commissioners are:

No	Indikator Pencapaian Kinerja	Performance Achievement Indicators	Satuan Unit	Bobot Weight	Target
A	**KPI Umum**	**General KPIs**		**40**	
1	Tingkat kehadiran dalam Rapat Dewan Komisaris	Attendance at Board of Commissioners Meetings	Jumlah Amount	14	24
2	Keikutsertaan dalam program pengembangan kompetensi Dewan Komisaris	Participation in Board of Commissioners Competency Development Programs	Jumlah Amount	13	4
3	Kunjungan Kerja Dewan Komisaris	Board of Commissioners Working Visits	Jumlah Amount	13	7
B	**KPI Khusus**	**Specific KPIs**		**60**	
1	**Agus Suhartono (Komisaris Utama/ Independen)**	**Agus Suhartono (President/ Independent Commissioner)**			
a	Koordinasi atas Persetujuan/ rekomendasi Dewan Komisaris terhadap usulan Direksi	Coordination of Board of Commissioners' Approval/ Recommendations on Board of Directors' Proposals	Hari Kerja Maksimal Maximum Working Days	20	14
b	Evaluasi dan validasi atas daftar Talenta BoD-1 yang disampaikan oleh Direksi	Evaluation and Validation of the BoD-1 Talent List submitted by Board of Directors	Dokumen Documents	20	1
c	Saran dan rekomendasi Dewan Komisaris atas usulan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris	Advice and Recommendation from Board of Commissioners on the proposed remuneration of Board of Directors and Board of Commissioners	Hari Kerja Maksimal Maximum Working Days	20	14
2	**Suntana (Wakil Komisaris Utama)**	**Suntana (Deputy President Commissioner)**			
a	Pengawasan dan arahan Dewan Komisaris atas kebijakan SDM	Board of Commissioners' Supervision and Direction on Human Resources Policy	Saran Recommendations	20	1
b	Persetujuan/rekomendasi Dewan Komisaris atas usulan pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan	Board of Commissioners' Approval/ Recommendation on the Proposed Appointment of Directors and Commissioners of Subsidiaries	Hari Kerja Maksimal Maximum Working Days	20	14
c	Pengawasan dan arahan Dewan Komisaris atas kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya	Board of Commissioners' Supervision and Direction on Procurement Policy and Its Implementation	Saran Recommendations	20	1
3	**Elwi Danil (Komisaris)**	**Elwi Danil (Commissioner)**			
a	Pengawasan dan arahan Dewan Komisaris atas pelaksanaan kegiatan pengembangan usaha	Board of Commissioners' Supervision and Direction on Business Development Activities	Saran Recommendations	20	1
b	Pengawasan dan arahan Dewan Komisaris atas rencana dan realisasi penyaluran TJSL/CSR	Board of Commissioners' Supervision and Direction on the Planning and Implementation of CSR Distribution	Saran Recommendations	20	1
c	Pengawasan dan arahan Dewan Komisaris atas permasalahan Hukum	Board of Commissioners' Supervision and Direction on Legal Issues	Saran Recommendations	20	1
4	**Maximianus Puguh Djiwanto (Komisaris Independen)**	**Maximianus Puguh Djiwanto (Commissioner) (Independent)**			
a	Pengawasan dan arahan Dewan Komisaris atas Sistem Pengendalian Internal serta Kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan	Board of Commissioners' Supervision and direction over the Internal Control System, Accounting Policies, and Financial Reporting	Saran Recommendations	20	2

No	Indikator Pencapaian Kinerja	Performance Achievement Indicators	Satuan Unit	Bobot Weight	Target
b	Persetujuan/rekomendasi Dewan Komisaris atas usulan penghapusbukuan piutang	Board of Commissioners' Approval/ Recommendation on the Proposed Write-Off of Receivables	Hari Kerja Maksimal Maximum Working Days	20	14
c	Saran dan Rekomendasi Dewan Komisaris atas laporan berkala Direksi, RJPP, dan RKAP	Board of Commissioners' Advice and Recommendation on Periodic Reports of Board of Directors, Long-Term Plan, and Work Plan and Budget	Hari Kerja Maksimal Maximum Working Days	20	14
5	**Rakhman Fuadhy Kurniawan (Komisaris Independen)**	**Rakhman Fuadhy Kurniawan (Independent Commissioner)**			
a	Pengawasan dan arahan Dewan Komisaris atas kebijakan operasional, kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaannya	Board of Commissioners' Supervision and direction over operational policies, quality policies, and services, and their implementation	Saran Recommendations	20	1
b	Pengawasan dan arahan Dewan Komisaris atas penerapan dan pengembangan IT	Board of Commissioners' Supervision and direction over IT implementation and development	Saran Recommendations	20	1
c	Persetujuan/rekomendasi Dewan Komisaris atas usulan penghapusbukuan aset tetap	Board of Commissioners' Approval/ Recommendation on the Proposed Write-Off of Fixed Assets	Hari Kerja Maksimal Maximum Working Days	20	14
6	**Jodi Mahardi (Komisaris)**	**Jodi Mahardi (Commissioner)**			
a	Pengawasan dan arahan Dewan Komisaris atas Pelaksanaan Manajemen Risiko, Bidang Teknik dan Komersial	Board of Commissioners' Supervision and direction over Risk Management Implementation, Technical, and Commercial Affairs	Saran Recommendations	20	3
b	Persetujuan/rekomendasi Dewan Komisaris atas usulan Kerjasama Usaha	Board of Commissioners' Approval/ Recommendation on the Proposed Business Partnership	Hari Kerja Maksimal Maximum Working Days	20	14
c	Evaluasi pencapaian GCG aspek Dewan Komisaris sesuai dengan target	Board of Commissioners' Evaluation of GCG Achievement in Accordance with Targets	Poin GCG GCG Points	20	31,5
7	**Arief Poyuono (Komisaris)**	**Arief Poyuono (Commissioner)**			
a	Pengawasan dan arahan Dewan Komisaris atas permasalahan Hukum	Board of Commissioners' Supervision and direction over Legal Issues	Saran Recommendations	20	1

No	Indikator Pencapaian Kinerja	Performance Achievement Indicators	Satuan Unit	Bobot Weight	Target
b	Pengawasan dan arahan Dewan Komisaris atas kebijakan operasional, kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaannya	Board of Commissioners' Supervision and direction over operational policies, quality policies, and services, and their implementation	Saran Recommendations	20	1
c	Saran dan rekomendasi Dewan Komisaris atas usulan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris	Board of Commissioners' Advice and Recommendation on the proposed remuneration of Board of Directors and Board of Commissioners	Saran Recommendations	20	1
8	**Ilhamsyah (Komisaris Independen)**	**Ilhamsyah (Independent Commissioner)**			
a	Pengawasan dan arahan Dewan Komisaris atas pelaksanaan pembinaan dan restrukturisasi anak perusahaan	Board of Commissioners' Supervision and direction regarding the implementation of the development and restructuring of subsidiaries	Saran Recommendations	20	1
b	Pengawasan dan arahan Dewan Komisaris atas permasalahan hubungan industrial	Board of Commissioners' Supervision and direction regarding industrial relations issues	Saran Recommendations	20	1
c	Pengawasan dan arahan Dewan Komisaris atas kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya	Board of Commissioners' Supervision and direction regarding procurement policies and their implementation	Saran Recommendations	20	1
	Jumlah KPI Masing-Masing Anggota Dewan Komisaris	**Total KPIs for Each Member of Board of Commissioners**		**100**	

PIHAK YANG MELAKUKAN PENILAIAN

Penilaian kinerja Dewan Komisaris baik secara kolegial maupun individu dilaksanakan dengan sistem *self assessment* dan disampaikan kepada Pemegang Saham.

ASSESSOR

Board of Commissioners' performance assessment both collegially and individually is carried out by self-assessment system and submitted to the Shareholders.

HASIL PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS PERFORMANCE ASSESSMENT RESULTS

PENCAPAIAN KPI KOLEGIAL DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS COLLEGIAL KPI ACHIEVEMENT

No.	Indikator Pencapaian Kinerja Performance Achievement Indicator	Satuan Unit	Bobot Weight	Target Target	Realisasi Realization	Capaian Achievement	Skor Capaian Achievement Score
1.	Kontribusi terhadap capaian kinerja Perusahaan Contribution to Company Performance Achievement		**10,00**				**10,41**
	Kontribusi terhadap realisasi capaian KPI Direksi Contribution to the Achievement of Board of Directors' KPIs	Poin Points	10,00	100	104,09	104%	10,41

No.	Indikator Pencapaian Kinerja Performance Achievement Indicator	Satuan Unit	Bobot Weight	Target Target	Realisasi Realization	Capaian Achievement	Skor Capaian Achievement Score
2.	Ketepatan waktu penyampaian Pendapat dan Saran yang menjadi kewajiban Dewan Komisaris Timeliness of Submission of Opinions and Suggestions Obligated by Board of Commissioners		**20,00**				**19,70**
	e. Pendapat dan Saran Dewan Komisaris atas RKAP 2025, Laporan Triwulanan 2025, dan Laporan Tahunan 2024 a. Opinions and Suggestions of Board of Commissioners on the 2025 Work Plan and Budget (RKAP), 2025 Quarterly Report, and 2024 Annual Report	Hari Kerja Working Days	5.00	30	19	120%	6,00
	f. Tanggapan atas tindakan Direksi yang harus mendapat persetujuan RUPS/Menteri b. Responses to Board of Directors' actions that require GMS/Ministerial approval	Hari Kerja Working Days	5,00	14	17	82%	4,08
	g. Tanggapan atas tindakan Direksi yang harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris c. Responses to Board of Directors' actions that require Board of Commissioners approval	Hari Kerja Working Days	5,00	14	19	72%	3,62
	h. Laporan Dewan Komisaris triwulanan dan Tahunan d. Quarterly and Annual Board of Commissioners Reports	Hari Kerja Working Days	5,00	30	13	120%	6,00
3.	Tingkat Kehadiran Anggota Dewan Komisaris Attendance Level of Board of Commissioners Members		**20,00**				**22,80**
	a. Jumlah Rapat Internal Dewan Komisaris Number of Internal Board of Commissioners Meetings	Jumlah Amount	6,00	12	21	120%	7,20
	b. Jumlah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Number of Board of Commissioners and Board of Directors Meetings	Jumlah Amount	6,00	12	12	100%	6,00
	c. Kunjungan Kerja Dewan Komisaris ke Cabang Board of Commissioners Working Visits to Branches	Jumlah Amount	8,00	7	22	120%	9,60
4.	Pengawasan dan arahan terhadap Direksi atas rencana dan kebijakan Perusahaan Supervision and direction of Board of Directors regarding company plans and policies	Jumlah Amount	**18,00**	7	59	120%	**21,60**

No.	Indikator Pencapaian Kinerja Performance Achievement Indicator	Satuan Unit	Bobot Weight	Target Target	Realisasi Realization	Capaian Achievement	Skor Capaian Achievement Score
5.	Efektivitas Kegiatan Penunjang Dewan Komisaris Effectiveness of Board of Commissioners Supporting Activities	Jumlah Amount	**30,00**				**31,20**
	a. Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris Competency Improvement of Board of Commissioners						
	Pengembangan kompetensi Dewan Komisaris Board of Commissioners' Competency Development	Pelaksanaan Amount	8,00	4	12	120%	9,60
	b. Efektivitas Organ Pendukung Effectiveness of Supporting Organs						
	Komite Audit Audit Committee						
	• Pelaksanaan Rapat Internal Komite Audit Implementation of Internal Audit Committee Meetings	Jumlah Amount	3,00	12	27	120%	3,60
	• Laporan Penugasan Komite Audit Internal Audit Committee Assignment Report	Laporan Report	3,00	4	27	120%	3,60
	Komite GCG & Pemantau Manajemen Risiko GCG & Risk Management Monitoring Committee						
	• Pelaksanaan Rapat Internal Komite PMR Implementation of GCG & Risk Management Monitoring Committee Meetings	Jumlah Amount	3,00	12	24	120%	3,60
	• Laporan Penugasan Komite PMR GCG & Risk Management Monitoring Committee Assignment Report	Laporan Report	3,00	4	24	120%	3,60
	Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee						
	• Pelaksanaan Rapat Internal Komite NR Implementation of Nomination and Remuneration Committee Meetings	Jumlah Amount	3,00	12	24	120%	3,60
	• Laporan Penugasan Komite NR Nomination and Remuneration Committee Assignment Report	Laporan Report	3,00	4	24	120%	3,60
	Komite Tata Kelola Terintefrasi Integrated Governance Committee						
	• Pelaksanaan Rapat Komite TKT Implementation of Integrated Corporate Governance Committee Meetings	Jumlah Amount	**4,00**	4	4	100%	4,00
7.	Pengawasan dan arahan atas rencana dan pelaksanaan program TJSL Supervision and direction of the planning and implementation of CSR program	Jumlah Amount	**2,00**	2	4	**120%**	**2,40**
	Jumlah Total		**100**				**108,11**

PENCAPAIAN KPI INDIVIDU DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS' INDIVIDUAL KPI ACHIEVEMENTS

Nama Name	**Jabatan** Position	**Pencapaian KPI** KPI Achievement
Agus Suhartono	Komisaris Utama/Independen President/Independent Commissioner	Sangat Baik Very Good
Suntana	Komisaris Commissioner	Sangat Baik Very Good
Rakhman Fuadhy Kurniawan	Komisaris Independen Independent Commissioner	Sangat Baik Very Good
Maximianus Puguh Djiwanto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Sangat Baik Very Good
Jodi Mahardi	Komisaris Commissioner	Sangat Baik Very Good
Ilhamsyah	Komisaris Independen Independent Commissioner	Sangat Baik Very Good
Arief Poyuono	Komisaris Commissioner	Sangat Baik Very Good

PENILAIAN KINERJA DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS PERFORMANCE APPRAISAL

PROSEDUR PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Pengelolaan KPI Direksi secara Kolegial diawali dengan penetapan KPI Direksi secara kolegial yang mengacu pada peraturan pemerintah yang berlaku, aspirasi pemegang saham, RJPP, RKAP, Benchmark KPI pada industri sejenis dan capaian KPI Perusahaan tahun sebelumnya. Hasil penetapan Direksi secara kolegial selanjutnya dituangkan dalam Kontrak Manajemen Tahunan Direksi secara Kolegial yang ditandatangani oleh Dewan Direksi dan Dewan Komisaris beserta perwakilan dari Pemegang Saham.

Penilaian KPI Direksi secara Kolegial diawali dengan pemetaan sumber data dan unit pemilik data (data producer), untuk kemudian mengisi data realisasi KPI pada kertas kerja pengukuran KPI. Jika tidak tercapai, maka pemilik data harus menyampaikan justifikasi ketidaktercapaian KPI beserta dokumen pendukung lainnya kepada Group Strategi Korporasi dan Inovasi.

Pencapaian KPI Direksi secara Kolegial dilaporkan secara berkala yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Manajemen. Laporan Capaian KPI Direksi secara Kolegial yang menjadi kesatuan dalam Laporan Manajemen akan dievaluasi oleh Komite Audit dan kemudian disampaikan tanggapan dari Dewan Komisaris kepada Direksi atas capaian KPI tersebut. Penilaian KPI Direksi secara Kolegial dilakukan mengacu kepada hasil pengukuran yang dilakukan oleh Auditor Eksternal yang mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan tahun yang bersangkutan dengan ketentuan realisasi akhir masing-masing variabel KPI maksimal 110% (seratus sepuluh persen).

PROCEDURE FOR PERFORMANCE APPRAISAL OF BOARD OF DIRECTORS

Collegial management of the Board of Directors' KPIs begins with a collegial determination of the Board of Directors' KPIs that refers to applicable government regulations, shareholder aspirations, RJPP and the Company's KPI achievements in the previous year. The results of collegial determination of Board of Directors are then set forth in the Annual Management Contract of Board of Directors, which is collegially signed by Board of Directors and Board of Commissioners along with representatives of the Shareholders.

The Board of Directors' KPI assessment begins with the mapping of data sources and data producer units, to then fill in the KPI Realization data on KPI measurement working paper. If not achieved, the data owner must submit justification for KPI nonachievement along with other supporting documents to the Strategic Planning Group. The Board of Directors' collegial KPI achievement on is reported periodically and becomes an integral part of the Management Report.

The Board of Directors Collegial KPI Achievement Report, which is an integral part of the Management Report, will be evaluated by Audit Committee and a response from Board of Commissioners to Board of Directors on the KPI achievement will be submitted. The assessment of the Board of Directors' KPIs Collegially is carried out with reference to the measurement results carried out by the External Auditor who audited the Company's Financial Statements for the year in question with the provision that the final Realization of each KPI variable is a maximum of 110% (one hundred and ten percent).

Sedangkan Hasil penetapan KPI Direksi secara Individual selanjutnya dituangkan dalam Kontrak Manajemen KPI Direksi secara Individual yang ditandatangani oleh Direksi terkait, Komisaris Utama dan Direktur Utama. Penilaian KPI Direksi secara Individual diawali dengan pemetaan sumber data dan unit pemilik data (data producer), untuk kemudian mengisi data realisasi KPI pada kertas kerja pengukuran KPI. Jika tidak tercapai, maka pemilik data harus menyampaikan justifikasi ketidaktercapaian KPI beserta dokumen pendukung lainnya kepada Group Strategi Korporasi dan Inovasi.

Pencapaian KPI Direksi secara Individual beserta penjelasan capaiannya disampaikan kepada Komisaris melalui Surat Dinas, Penilaian KPI Direksi secara Individual dilakukan mengacu kepada hasil pengukuran yang dilakukan oleh Auditor Eksternal yang mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan tahun yang bersangkutan, dengan ketentuan realisasi akhir masing-masing variabel KPI maksimal 110% (seratus sepuluh persen).

KRITERIA PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Adapun KPI Direksi secara kolegial Tahun 2025 terdiri atas berikut ini:

1. Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia
   a. Finansial
      - EBITDA
      - ROIC > WACC
   b. Operasional
      - Volume Trafik
      - Capaian Produktivitas
   c. Sosial
      - Net Promotor Score (NPS)
      - ESG Rating
2. Inovasi Model Bisnis
   a. Penyelesaian Pemurnian Bisnis
   b. Additional MEPS Offering
   c. Number of KRI Exceeding its Risk Tolerance
3. Kepemimpinan Teknologi
   a. Average Schedule Variance for Key Projects: Standarisasi dan Digitalisasi Petikemas, Layanan Non Petikemas, dan Layanan Marine
   b. Implementasi SInergi dan Integrasi Logistik dalam Ekosistem BUMN
4. Peningkatan Investasi
   a. Pengembangan Infrastruktur dan Peralatan Pelabuhan
   b. Realisasi PMN
5. Pengembangan Talenta
   a. Human Capital Transformation

Whereas the determination of Individual Directors' KPIs is set forth in the Individual Directors' KPI Management Contract signed by the relevant Directors, President Commissioner and President Director, Individual Board of Directors KPI Assessment begins with the mapping of data sources and data producer units, to then fill in KPI realization data on KPI measurement work papers, If not achieved, the data owner must submit justification for KPI non-achievement along with other supporting documents to the Corporate Strategy and Innovation Group.

The achievement of individual Directors' KPIs along with explanations of their attainment is communicated to the Board of Commissioners through official correspondence. The assessment of individual Directors' KPIs is conducted based on the measurement results carried out by the External Auditor auditing the Financial Statements of the respective Company, with the provision that the final realization of each KPI variable is a maximum of 110%.

CRITERIA OF BOARD OF DIRECTORS PERFORMANCE ASSESSMENT

Board of Directors' collective KPIs for 2025 consist of the following:

1. Economic and Social Value for Indonesia
   a. Financial
      - EBITDA
      - ROIC > WACC
   b. b. Operational
      - Traffic Volume
      - Productivity Achievement
   c. Social
      - Net Promoter Score (NPS)
      - ESG Rating
2. Business Model Innovation
   a. Completion of Business Refinements
   b. Additional MEPS Offering
   c. Number of KRIs Exceeding its Risk Tolerance
3. Technology Leadership
   a. Average Schedule Variance for Key Projects: Standardization and Digitalization of Containers, Non-Container Services, and Marine Services
   b. Implementation of Synergy and Logistics Integration within the SOE Ecosystem
4. Investment Increase
   a. Development of Port Infrastructure and Equipment
   b. PMN Realization
5. Talent Development
   a. Human Capital Transformation

Pengelolaan KPI Direksi secara Individual mengacu kepada peraturan pemerintah yang belaku, RJPP, RKAP, KPI Direksi Kolegial dan inisiatif strategis/RKM pada Direktorat tersebut, KPI Direksi Individual merupakan KPI Direktur Utama yang diturunkan kepada masing-masing anggota Direksi sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab anggota Direksi tersebut dalam lingkup direktorat yang dipimpinnya, KPI Direksi secara individual terdiri dari:

1. KPI Bersama: merupakan variabel KPI dalam KPI Direksi Kolegial yang disepakati menjadi tanggung jawab secara kolegial/bersama. Pembobotan atas KPI Bersama yaitu sebesar 40%,
2. KPI Direktorat: merupakan variabel KPI yang mencerminkan tugas, fungsi dan tanggung jawab Direktorat yang memberikan kontribusi/dukungan secara langsung kepada KPI Direksi Kolegial. Pembobotan atas KPI Direktorat yaitu sebesar 60%,,

PIHAK YANG MELAKUKAN PENILAIAN

Pihak yang melakukan penilaian kinerja Direksi yaitu Dewan Komisaris dan disampaikan ke Pemegang Saham/RUPS. Penilaian KPI Direksi secara Kolegial dilakukan mengacu kepada hasil pengukuran yang dilakukan oleh Auditor Eksternal yang mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan tahun yang bersangkutan.

HASIL PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Pencapaian KPI Direksi secara kolegial Tahun 2025 audited adalah sebagai berikut:

Individual Directors' KPI management refers to applicable government regulations, the Long-Term Development Plan (RJPP), the Work Plan and Budget (RKAP), the Collegial Directors' KPI, and strategic initiatives/RKM within the Directorate. Individual Directors' KPIs are the President Director's KPIs, which are passed down to each member of Board of Directors in accordance with their duties, functions, and responsibilities within the directorate they lead. Individual Directors' KPIs consist of:

1. Joint KPIs: These are KPI variables within the Collegial Directors' KPIs that are agreed upon as collective/shared responsibilities. The Joint KPI is weighted at 40%.
2. Directorate KPIs: These are KPI variables that reflect the duties, functions, and responsibilities of the Directorate that directly contribute to/support the Collegial Directors' KPIs. The Directorate KPI is weighted at 60%.

ASSESSOR

The party that conducts the performance appraisal of Board of Directors is the Board of Commissioners and is submitted to the Shareholders/GMS. The collegial KPI assessment of Board of Directors is carried out with reference to the measurement results conducted by External Auditors who audit the Company's Financial Statements for the relevant year.

BOARD OF DIRECTORS' PERFORMANCE ASSESSMENT RESULTS

The Board of Directors' collective KPI achievements for 2025 (Audited) are as follows:

KPI	Satuan Unit	Target Target	Polaritas Polarity	Bobot Weight	31 Desember 2025 (Auditan) December 31, 2025 (Audited)		
					Realisasi Realization	Capaian Achievement	Skor Score
Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia Economic and Social Value for Indonesia				55			
Finansial Financial							
EBITDA	Rupiah (Miliar) Rupiah (Billion)	11.274	Maximize	7	12.165	107,90	7,55
ROIC > WACC	%	1,08	Maximize	7	1,63	110,00	7,70
Operasional Operational							
Volume Trafik Traffic Volume	%	100	Maximize	11	99,94	99,94	10,99

KPI	Satuan Unit	Target Target	Polaritas Polarity	Bobot Weight	31 Desember 2025 (Auditan) December 31, 2025 (Audited)		
					Realisasi Realization	Capaian Achievement	Skor Score
Capaian Produktivitas Productivity Achievements	%	100	Maximize	11	113,62	110,00	12,10
Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR)	Skor Score	0,93	Minimize	5	0,04	110,00	5,50
Sosial Social							
Net Promotor Score (NPS)	%	40	Maximize	7	60,46	110,00	7,70
ESG Rating	%	100	Maximize	7	100,00	100,00	7,00
Inovasi Model Bisnis Business Model Innovation				15			
Penyelesaian pemurnian bisnis Completion of business refinement	%	100	Maximize	5	84,90	84,90	4,25
Additional MEPS Offering	Jumlah Amount	4	Maximize	5	7,00	110,00	5,50
Number of KRI Exceeding its Risk Tolerance	%	25	Minimize	5	5,88	110,00	5,50
Kepemimpinan Teknologi Technology Leadership				13			
Average Schedule Variance for Key Projects: Standarisasi dan Digitalisasi Petikemas, Layanan Non Petikemas, dan Layanan Marine Average Schedule Variance for Key Projects: Standardization and Digitalization of Containers, Non-Container Services, and Marine Services	%	100	Maximize	7	100,00	100,00	7,00
Implementasi Sinergi dan Integrasi Logistik dalam Ekosistem BUMN Implementation of Logistics Synergy and Integration in the State-Owned Enterprise Ecosystem	%	100	Maximize	6	100,00	100,00	6,00
Peningkatan Investasi Increased Investment				12			
Pengembangan Infrastruktur dan Peralatan Pelabuhan Port Infrastructure and Equipment Development	%	100	Maximize	7	102,16	102,16	7,15
Realisasi PMN State Capital Investment (PMN) Realization	%	100	Maximize	5	126,97	110,00	5,50

KPI	Satuan Unit	Target Target	Polaritas Polarity	Bobot Weight	31 Desember 2025 (Auditan) December 31, 2025 (Audited)		
					Realisasi Realization	Capaian Achievement	Skor Score
Pengembangan Talenta Talent Development				5			
Human Capital Transformation	%	100	Maximize	5	105,87	105,87	5,29
Total				100,00			104,73

Adapun pencapaian KPI Direksi secara individual Tahun 2025 (Auditan) adalah sebagai berikut:

The individual KPI achievements of Board of Directors for 2025 (Audited) are as follows:

A. **Direktur SDM dan Umum**

A. **Director of Human Resources and General Affairs**

KPI	Satuan Unit	Target Target	Polaritas Polarity	Bobot Weight	31 Desember 2025 (Auditan) December 31, 2025 (Audited)		
					Realisasi Realization	Capaian Achievement	Skor Score
KPI Bersama Joint KPI				40			
EBITDA	Rupiah (Miliar) Rupiah (Billion)	11.274	Maximize	8	12.165	107,90	8,63
ROIC > WACC	%	1,08	Maximize	6	1,63	110,00	6,60
Realisasi PMN PMN Realization	%	100	Maximize	7	126,97	110,00	7,70
ESG Rating	%	100	Maximize	10	100,00	100,00	10,00
Number of KRI Exceeding its Risk Tolerance	%	25	Minimize	9	5,88	110,00	9,50
KPI Direktorat Directorate KPI				60			
Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR)	Skor Score	0,93	Minimize	4	0,04	110,00	4,40
Penyelesaian pemurnian bisnis Completion of business refinement	%	100	Maximize	4	84,90	84,90	3,40
Human Capital Transformation	%	100	Maximize	8	105,87	105,87	8,47
Talent Mobility	%	100	Maximize	5	184	110,00	5,50
Implementasi Perdir TAD Implementation of the TAD Regulation	%	100	Maximize	7	100	100,00	7,00

KPI	Satuan Unit	Target Target	Polaritas Polarity	Bobot Weight	31 Desember 2025 (Auditan) December 31, 2025 (Audited)		
					Realisasi Realization	Capaian Achievement	Skor Score
Implementasi Employee Well Being Program (EWP) : Pelaksanaan Pelindo Fit Implementation of Employee Well-Being Program (EWP): Implementation of Pelindo Fit	%	100	Maximize	7	100	100,00	7,00
Nilai Komitmen Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Domestic Component Level Commitment (TKDN) Value	%	35	Maximize	6	71,84	110,00	6,60
Tindak lanjut Roadmap Penyehatan Dana Pensiun Follow-up on the Pension Fund Restructuring Roadmap	%	100	Maximize	7	100	100,00	7,00
Pemenuhan Kuantitas dan Kualitas Data SDM Meeting the Quantity and Quality of Human Resource Data	%	100	Maximize	5	100	100,00	5,00
Implementasi Program TJSL Implementation of CSR Program	%	100	Maximize	7	100	100,00	7,00
Total				100,00			104,20

B. **Direktur Manajemen Risiko** B. **Director of Risk Management**

KPI	Satuan Unit	Target Target	Polaritas Polarity	Bobot Weight	31 Desember 2025 (Auditan) December 31, 2025 (Audited)		
					Realisasi Realization	Capaian Achievement	Skor Score
KPI Bersama Joint KPI				40			
EBITDA	Rupiah (Miliar) Rupiah (Billion)	11.274	Maximize	8	12.165	107,90	8,63
ROIC > WACC	%	1,08	Maximize	7	1,63	110,00	7,70
Realisasi PMN PMN Realization	%	100	Maximize	6	126,97	110,00	6,60
ESG Rating	%	100	Maximize	9	100,00	100,00	9,00
Number of KRI Exceeding its Risk Tolerance	%	25	Minimize	10	5,88	110,00	11,00
KPI Direktorat Directorate KPI				60			
Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR)	Skor Score	0,93	Minimize	8	0,04	110,00	5,50

KPI	Satuan Unit	Target Target	Polaritas Polarity	Bobot Weight	31 Desember 2025 (Auditan) December 31, 2025 (Audited)		
					Realisasi Realization	Capaian Achievement	Skor Score
Penyelesaian pemurnian bisnis Completion of Business Refinement	%	100	Maximize	4	84,90	84,90	4,25
Pengembangan Infrastruktur dan Peralatan Pelabuhan Development of Port Infrastructure and Equipment	%	100	Maximize	5	102,16	102,16	5,11
Average Schedule Variance for Key Projects: Standardisasi dan Digitalisasi Layanan Petikemas, Layanan Non Petikemas & Layanan Marine Average Schedule Variance for Key Projects: Standardization and Digitalization of Container Services, Non-Container Services	%	100	Maximize	4	100,00	100,00	4,00
Upaya Litigasi Penyelamatan Aset Perusahaan, and Marine Services Litigation Efforts to Rescue Company Assets	Jumlah	2	Maximize	8	3,00	110,00	8,80
Pelaksanaan ICOFR Implementation of ICOFR	%	100	Maximize	4	110,00	110,00	4,40
Pelaksanaan Penanganan Masalah Hukum Implementation of Legal Issue Handling	%	100	Maximize	7	100,00	100,00	7,00
Implementasi dan Pengelolaan Sistem Manajemen Terpadu di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Implementation and Management of an Integrated Management System within PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	%	100	Maximize	8	100,00	100,00	8,00
Implementasi Business Continuity Management Implementation of Business Continuity Management	%	100	Maximize	6	100,00	100,00	6,00

KPI	Satuan Unit	Target Target	Polaritas Polarity	Bobot Weight	31 Desember 2025 (Auditan) December 31, 2025 (Audited)		
					Realisasi Realization	Capaian Achievement	Skor Score
Pendampingan Hukum Program Strategis Perusahaan Legal Assistance for the Company's Strategic Programs	%	100	Maximize	6	121,40	110,00	6,60
Total				**100,00**			**105,04**

C. **Direktur Keuangan**

C. **Director of Finance**

KPI	Satuan Unit	Target Target	Polaritas Polarity	Bobot Weight	31 Desember 2025 (Auditan) December 31, 2025 (Audited)		
					Realisasi Realization	Capaian Achievement	Skor Score
KPI Bersama Joint KPI				40			
EBITDA	Rupiah (Miliar) Rupiah (Billion)	11.274	Maximize	10	12.165	107,90	10,79
ROIC > WACC	%	1,08	Maximize	9	1,63	110,00	9,90
Realisasi PMN PMN Realization	%	100	Maximize	8	126,97	110,00	8,80
ESG Rating	%	100	Maximize	6	100,00	100,00	6,00
Number of KRI Exceeding its Risk Tolerance	%	25	Minimize	7	5,88	110,00	7,70
KPI Direktorat Directorate KPI				60			
Penyelesaian pemurnian bisnis Completion of Business Refinement	%	100	Maximize	4	84,90	84,90	3,40
Capaian Produktivitas Productivity Achievements	%	100	Maximize	4	113,62	110,00	4,40
Net Promotor Score (NPS)	%	40	Maximize	5	60,46	110,00	5,50
Pelaksanaan ICOFR Implementation of ICOFR	%	100	Maximize	8	110,00	110,00	8,80
Penyelesaian Laporan Keuangan Konsolidasi PT Pelindo (Persero) Tahun Buku 2024 Completion of PT Pelindo (Persero)'s Consolidated Financial Statements for Fiscal Year 2024	WTP	100	Maximize	7	100,00	100,00	7,00

KPI	Satuan Unit	Target Target	Polaritas Polarity	Bobot Weight	31 Desember 2025 (Auditan) December 31, 2025 (Audited)		
					Realisasi Realization	Capaian Achievement	Skor Score
Implementasi Akuntansi Biaya pada SAP pada entitas SPTP dan SPMT Implementation of Cost Accounting in SAP for SPTP and SPMT entities	%	100	Maximize	7	100,00	100,00	7,00
Optimalisasi Rasio Piutang Usaha Optimization of Accounts Receivable Ratio	Hari Days	20	Maximize	6	14,21	110,00	6,60
Optimalisasi Pendanaan Optimization of Funding	Rupiah (Miliar) Rupiah (Billion)	800	Maximize	8	999,15	110,00	8,80
Tindak Lanjut Roadmap Penyehatan Dana Pensiun Follow-up on Pension Fund Restructuring Roadmap	%	100	Maximize	6	100,00	110,00	6,00
Tingkat Kesehatan Perusahaan (Corporate Rating) Corporate Rating	%	100	Maximize	5	110,00	110,00	5,50
Total				**100,00**			**106,19**

D. **Direktur Teknik**

D. **Technical Director**

KPI	Satuan Unit	Target Target	Polaritas Polarity	Bobot Weight	31 Desember 2025 (Auditan) December 31, 2025 (Audited)		
					Realisasi Realization	Capaian Achievement	Skor Score
KPI Bersama Joint KPI				40			
EBITDA	Rupiah (Miliar) Rupiah (Billion)	11.274	Maximize	6	12.165	107,90	6,47
ROIC > WACC	%	1,08	Maximize	7	1,63	110,00	7,70
Realisasi PMN PMN Realization	%	100	Maximize	9	126,97	110,00	9,90
ESG Rating	%	100	Maximize	10	100,00	100,00	10,00
Number of KRI Exceeding its Risk Tolerance	%	25	Minimize	8	5,88	110,00	8,80
KPI Direktorat Directorate KPI				60			
Volume Trafik Traffic Volume	%	100	Maximize	5	99,94	99,94	5,00

KPI	Satuan Unit	Target Target	Polaritas Polarity	Bobot Weight	31 Desember 2025 (Auditan) December 31, 2025 (Audited)		
					Realisasi Realization	Capaian Achievement	Skor Score
Capaian Produktivitas Productivity Achievements	%	100	Maximize	7	113,62	110,00	7,70
Average Schedule Variance for Key Projects: Standardisasi dan Digitalisasi Layanan Petikemas, Layanan Non Petikemas & Layanan Marine Average Schedule Variance for Key Projects: Standardization and Digitalization of Container Services, Non-Container Services, and Marine Services	%	100	Maximize	5	100,00	100,00	5,00
Pengembangan Infrastruktur dan Peralatan Pelabuhan Port Infrastructure and Equipment Development	%	100	Maximize	8	102,16	102,16	8,17
Net Promotor Score (NPS)	%	40	Maximize	4	60,46	110,00	4,40
Availability Peralatan dan Fasilitas Pelabuhan Availability of Port Equipment and Facilities	%	82,50	Maximize	6	97,28	110,00	6,60
Penyerahan (Inbreng) Aset Peralatan Kepada Subholding Transfer of Equipment Assets to Subholdings	%	100	Maximize	8	95,50	95,50	7,64
Pemenuhan Peringkat PROPER Biru KLHK Meeting the Ministry of Environment and Forestry's Blue PROPER Rating	%	80	Maximize	7	79,00	98,75	6,91
Perencanaan Teknik Pengerukan Alur dan Kolam Dredging Technical Planning for Channels and Ponds	%	100	Maximize	5	100,00	100,00	5,00
Efisiensi Biaya Konsumsi Energi Peralatan Pelabuhan) Energy Consumption Cost Efficiency of Port Equipment	%	10	Maximize	5	94,09	110,00	5,50
Total				**100,00**			**104,79**

E. **Direktur Komersial**

E. **Commercial Director**

KPI	Satuan Unit	Target Target	Polaritas Polarity	Bobot Weight	31 Desember 2025 (Auditan) December 31, 2025 (Audited)		
					Realisasi Realization	Capaian Achievement	Skor Score
KPI Bersama Joint KPI				40			

KPI	Satuan Unit	Target Target	Polaritas Polarity	Bobot Weight	31 Desember 2025 (Auditan) December 31, 2025 (Audited)		
					Realisasi Realization	Capaian Achievement	Skor Score
EBITDA	Rupiah (Miliar) Rupiah (Billion)	11.274	Maximize	10	12.165	107,90	10,79
ROIC > WACC	%	1,08	Maximize	8	1,63	110,00	8,80
Realisasi PMN PMN Realization	%	100	Maximize	9	126,97	110,00	9,90
ESG Rating	%	100	Maximize	7	100,00	100,00	7,00
Number of KRI Exceeding its Risk Tolerance	%	25	Minimize	6	5,88	110,00	6,60
KPI Direktorat Directorate KPI				60			
Volume Trafik Traffic Volume	%	100	Maximize	8	99,94	99,94	7,99
Net Promotor Score (NPS)	%	40	Maximize	7	60,46	110,00	7,70
Penyelesaian Pemurnian Bisnis Completion of Business Refinement	%	100	Maximize	4	84,90	84,90	3,40
Implementasi Sinergi dan Integrasi Logistik dalam Ekosistem BUMN Implementation of Logistics Synergy and Integration within the State-Owned Enterprise Ecosystem	%	100	Maximize	5	100,00	100,00	5,00
Usulan Penyesuaian Tarif Jasa Kepelabuhanan dan Penetapan Tarif Jasa Terkait Kepelabuhanan Proposed Adjustment of Port Service Tariffs and Determination of Port-Related Service Tariffs	Jumlah Amount	30	Maximize	8	50,00	110,00	8,80
Market Share Curah Bulk Market Share	%	60	Maximize	8	65,00	108,33	8,67
Realisasi Balik Nama Sertipikat menjadi PT Pelindo (Persero) Implementation of Certificate Name Change to PT Pelindo (Persero)	%	100	Maximize	5	105,00	105,00	5,25

KPI	Satuan Unit	Target Target	Polaritas Polarity	Bobot Weight	31 Desember 2025 (Auditan) December 31, 2025 (Audited)		
					Realisasi Realization	Capaian Achievement	Skor Score
Penyelesaian Permasalahan Aset Perusahaan Non Litigasi dan Pengamanan Aset Resolution of Non-Litigation Company Asset Issues and Asset Security	%	100	Maximize	5	105,00	105,00	5,25
Komersialisasi Lahan Idle Commercialization of Idle Land	Jumlah Amount	8	Maximize	5	20,00	110,00	5,50
Implementasi National Deal/Joint Marketing Implementation of National Deal/Joint Marketing	Jumlah Amount	4	Maximize	5	9,00	110,00	5,50
Total				**100,00**			**106,15**

F. Direktur Pengembangan Usaha

C. Director of Business Development

KPI	Satuan Unit	Target Target	Polaritas Polarity	Bobot Weight	31 Desember 2025 (Auditan) December 31, 2025 (Audited)		
					Realisasi Realization	Capaian Achievement	Skor Score
KPI Bersama Joint KPI				40			
EBITDA	Rupiah (Miliar) Rupiah (Billion)	11.274	Maximize	9	12.165	107,90	9,71
ROIC > WACC	%	1,08	Maximize	10	1,63	110,00	11,00
Realisasi PMN PMN Realization	%	100	Maximize	8	126,97	110,00	8,80
ESG Rating	%	100	Maximize	7	100,00	100,00	7,00
Number of KRI Exceeding its Risk Tolerance	%	25	Minimize	6	5,88	110,00	6,60
KPI Direktorat Directorate KPI				60			
Volume Trafik Traffic Volume	%	100	Maximize	6	99,94	99,94	6,00
Penyelesaian Pemurnian Bisnis Completion of Business Refinement	%	100	Maximize	6	84,90	84,90	5,09
Additional MEPS Offering	Jumlah Amount	4	Maximize	6	7,00	110,00	6,60

KPI	Satuan Unit	Target Target	Polaritas Polarity	Bobot Weight	31 Desember 2025 (Auditan) December 31, 2025 (Audited)		
					Realisasi Realization	Capaian Achievement	Skor Score
Implementasi Sinergi dan Integrasi Logistik dalam Ekosistem BUMN Implementation of Logistics Synergy and Integration within the State-Owned Enterprise Ecosystem	%	100	Maximize	9	100,00	100,00	9,00
Pengembangan Infrastruktur dan Peralatan Pelabuhan Development of Port Infrastructure and Equipment	%	100	Maximize	5	102,16	-102,16	5,11
Optimalisasi Perencanaan Investasi Pelindo Grup Tahun 2026 Optimization of Pelindo Group's 2026 Investment Planning	%	100	Maximize	6	110,00	110,00	6,60
Realisasi Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Realization of the Port Master Plan Preparation	%	100	Maximize	7	100,00	100,00	7,00
Persetujuan Usulan Perjanjian Kerjasama dengan Mitra Strategis untuk Terminal Kalibaru Approval of the Proposed Cooperation Agreement with Strategic Partners for Kalibaru Terminal	%	100	Maximize	6	100,00	100,00	6,00
Pengembangan dan Peningkatan Sistem di Group Layanan Keuangan dan Perpajakan System Development and Improvement in the Financial Services and Taxation Group	%	100	Maximize	5	100,00	100,00	5,00
Evaluasi Paska Investasi (Kesesuaian CAPEX Plan dan Revenue Plan) Post-Investment Evaluation (Suitability of CAPEX Plan and Revenue Plan)	%	100	Maximize	4	100,00	100,00	4,00
Total				**100,00**			**103,51**

G. **Direktur Operasi**

KPI	Satuan Unit	Target Target	Polaritas Polarity	Bobot Weight	31 Desember 2025 (Auditan) December 31, 2025 (Audited)		
					Realisasi Realization	Capaian Achievement	Skor Score
KPI Bersama Joint KPI				40			
EBITDA	Rupiah (Miliar) Rupiah (Billion)	11.274	Maximize	10	12.165	107,90	10,79
ROIC > WACC	%	1,08	Maximize	9	1,63	110,00	9,90
Realisasi PMN PMN Realization	%	100	Maximize	6	126,97	110,00	6,60

KPI	Satuan Unit	Target Target	Polaritas Polarity	Bobot Weight	31 Desember 2025 (Auditan) December 31, 2025 (Audited)		
					Realisasi Realization	Capaian Achievement	Skor Score
ESG Rating	%	100	Maximize	8	100,00	100,00	8,00
Number of KRI Exceeding its Risk Tolerance	%	25	Minimize	7	5,88	110,00	7,70
KPI Direktorat Directorate KPI				60			
Volume Trafik Traffic Volume	%	100	Maximize	8	99,94	99,94	7,99
Capaian Produktivitas Productivity Achievements	%	100	Maximize	8	113,62	110,00	8,80
Penyelesaian Pemurnian Bisnis Completion of Business Refinement	%	100	Maximize	4	84,90	84,90	3,40
Additional MEPS Offering	%	4	Maximize	5	7,00	110,00	5,50
Average Schedule Variance for Key Projects: Standardisasi dan Digitalisasi Layanan Petikemas, Layanan Non Petikemas & Layanan Marine Average Schedule Variance for Key Projects: Standardization and Digitalization of Container Services, Non-Container Services, and Marine Services	%	100	Maximize	8	100,00	100,00	8,00
Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR)	Skor Score	0,93	Maximize	7	0,04	110,00	7,70
Implementasi Pengembangan Bisnis Pengelolaan Alur Pelayaran di Pelindo Group Implementation of Shipping Channel Management Business Development at Pelindo Group	%	100	Maximize	6	96,25	96,25	5,78
Penanganan Cyber Attack Cyber Attack Mitigation	%	100	Maximize	5	96,41	96,41	5,07
Standarisasi dan Digitalisasi Layanan IT IT Service Standardization and Digitalization	%	100	Maximize	5	105,00	105,00	5,25
Integrasi Sistem Pelayanan Kapal dengan Sistem Pelayanan Terminal Integration of Ship Service Systems with Terminal Service Systems	%	100	Maximize	4	181,25	110,00	4,40
Total				**100,00**			**104,88**

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS DAN DASAR PENILAIANNYA

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris dibantu oleh komite-komite yang berada di bawah Dewan Komisaris meliputi Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko serta Komite Tata Kelola Terintegrasi. Prosedur penilaian terhadap kinerja Komite dilakukan secara tahunan. Kriteria penilaian atas kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris merupakan bagian dari KPI Dewan Komisaris yang telah disetujui oleh Pemegang Saham. Adapun kriteria penilaian kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris yaitu Pelaksanaan Rapat Internal Komite dan Laporan Penugasan Komite.

Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris menilai komite-komite tersebut telah menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam mengawasi aspek-aspek operasional dan strategis Perseroan dengan baik.

MEKANISME PEMBERHENTIAN DAN PENGUNDURAN DIRI DEWAN KOMISARIS

Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya, dengan memberitahukan rencana pemberhentian tersebut kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik secara lisan maupun tertulis oleh Pemegang Saham. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan, antara lain:

1. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
2. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;
3. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan dan/atau Negara;
4. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagaimana anggota Dewan Komisaris BUMN;
5. Dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
6. Mengundurkan diri;
7. Memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris;
8. Telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa oleh pihak yang berwenang dalam tindakan yang merugikan Perusahaan dan/atau keuangan Negara; atau

PERFORMANCE ASSESSMENT OF COMMITTEES UNDER BOARD OF COMMISSIONERS AND BASIS OF ASSESSMENT

In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Commissioners is assisted by committees under the Board of Commissioners, namely Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, GCG and Risk Management Monitoring Committee, and Integrated Governance Committee. The assessment procedure of committee performance is conducted annually. The performance assessment criteria for Committees under Board of Commissioners are part of the Board of Commissioners' KPIs, which have been approved by Shareholders. The performance assessment criteria for these committees include the Implementation of Internal Committee Meetings and Committee Assignment Reports.

Throughout 2025, Board of Commissioners assessed that these committees had adequately carried out their duties and responsibilities in overseeing the Company's operational and strategic aspects.

BOARD OF COMMISSIONERS RESIGNATION AND DISMISSAL MECHANISM

Members of Board of Commissioners can be dismissed at any time based on a GMS resolution by stating the reasons, by notifying the planned dismissal to the member of Board of Commissioners concerned, both orally and in writing by the Shareholders. The dismissal of Board of Commissioners member is carried out if based on the facts, the member concerned, among others:

1. Unable to carry out his/her duties properly;
2. Fail to comply with statutory provisions and/or provisions of the Articles of Association;
3. Involved in actions that are detrimental to the Company and/or the State;
4. Performing actions that violate ethics and/or propriety that should be respected as members of Board of Commissioners of SOEs;
5. Declared guilty by a court decision that has permanent legal force;
6. Resigned;
7. Having family relations up to the third degree, both in a straight line and sideways, including relationships arising from marriages between members of Board of Directors and members of Board of Commissioners;
8. Has been designated as a suspect or defendant by the competent authority for actions detrimental to the Company and/or state finances; or

9. Berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perusahaan.

Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris lainnya dan Direksi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Apabila dalam surat pengunduran diri disebutkan tanggal efektif kurang dari 30 (tiga puluh) hari dari tanggal surat diterima, maka dianggap tidak menyebutkan tanggal efektif pengunduran diri;
2. Apabila sampai dengan tanggal yang diminta oleh anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat permohonan diri diterima dalam hal tidak disebutkan tanggal efektif pengunduran diri, maka anggota Dewan Komisaris tersebut berhenti dengan sendirinya pada tanggal yang diminta tersebut di atas atau dengan lewatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri diterima tanpa memerlukan persetujuan RUPS;
3. Pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dapat kurang dari 30 (tiga puluh) hari, apabila secara peraturan perundangan tidak memperbolehkan yang bersangkutan merangkap jabatan;
4. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak mengundurkan diri dan secara peraturan perundangan tidak memperbolehkan yang bersangkutan merangkap jabatan, maka anggota Dewan Komisaris tersebut dianggap telah mengundurkan diri dan RUPS hanya menetapkan atau meratifikasi pengunduran diri tersebut telah menjadi efektif berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KEBIJAKAN KEBERAGAMAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Pelindo senantiasa menjaga keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi untuk mendorong pengambilan keputusan yang lebih objektif, komprehensif, optimal, serta berdampak positif terhadap pengawasan dan pengelolaan Perusahaan. Dengan adanya keberagaman dalam komposisi Dewan Komisaris dan Direksi, diharapkan Perusahaan dapat memperkaya sudut pandang dalam pengambilan keputusan, baik dalam jajaran Dewan Komisaris maupun Direksi, sehingga mampu memberikan nilai tambah dalam kegiatan operasional dan manajemen Perusahaan, termasuk dalam hal penerapan tata kelola perusahaan.

Board Manual telah mengatur bahwa anggota Dewan Komisaris dan Direksi wajib memenuhi persyaratan pengetahuan dan keahlian. Hal ini menunjukkan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi harus memiliki keberagaman pengetahuan dan keahlian sesuai dengan kebutuhan operasional Perusahaan. Perusahaan belum

9. Based on other reasons deemed appropriate by the GMS for the interests and objectives of the Company.

Members of Board of Commissioners have the right to resign under the following conditions:
1. Notify in writing regarding his/her intention to the Shareholders, other members of Board of Commissioners and Board of Directors no later than 30 (thirty) days prior to the date of his/her resignation. If the resignation letter states that the effective date is less than 30 (thirty) days from the receipt date of the letter, then it is deemed not to mention the effective date of resignation;
2. If until the date requested by the member of Board of Commissioners concerned or within 30 (thirty) days from the date the letter of resignation is received in the event that the effective date of resignation is not stated, then the member of Board of Commissioners resigns automatically on the date requested mentioned above or with the passing of 30 (thirty) days from the date the letter of resignation is received without requiring the GMS approval;
3. The resignation of a member of Board of Commissioners can be less than 30 (thirty) days, if the laws and regulations do not allow the person concerned to have concurrent positions;

4. In the event that a member of Board of Commissioners does not resign and the laws and regulations do not allow the person concerned to hold concurrent positions, then the member of Board of Commissioners is considered to have resigned and the GMS only determines or ratifies the resignation as effective based on laws and regulations.

POLICY OF BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS DIVERSITY

Pelindo always maintains diversity in the composition of Board of Commissioners and Board of Directors to encourage more objective, comprehensive, optimal decision making, and have positive impacts on the supervision and management of the Company. With the diversity in the composition of Board of Commissioners and Board of Directors, the Company is expected to enrich the point of view in decision making, both within Board of Commissioners and Board of Directors, so as to provide added value in the Company's operational and management activities, including in terms of implementing corporate governance.

The Board Manual stipulates that members of Board of Commissioners and Board of Directors must fulfil the knowledge and expertise requirements. This indicates that Board of Commissioners and Board of Directors must have a diversity of knowledge and expertise in accordance with the Company's operational needs. The Company has not

mengembangkan kebijakan keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi secara khusus, Keberagaman usia dan gender belum diatur karena Perusahaan masih menekankan pada keberagaman keahlian tanpa memandang usia dan gender.

developed a specific policy on the diversity in composition of Board of Commissioners and Board of Directors. Age and gender diversity have not been regulated because the Company still emphasises on diversity of expertise regardless of age and gender.

Tabel Keberagaman Komposisi Direksi
Diversity in Board of Directors Composition

Nama Name	**Jabatan** Position	**Usia** Age	**Jenis Kelamin** Gender	**Pendidikan** Education	**Pengalaman Kerja** Work Experience	**Keahlian** Expertise
Arif Suhartono	Direktur Utama President Director	55 tahun 55 years old	Pria Male	• S1 bidang Teknik Sipil • S2 bidang Infrastructure Management • S2 bidang Business Administration • Bachelor's degree in Civil Engineering • Master's degree in Infrastructure Management • Master's degree in Business Administration	Memiliki pengalaman kerja di bidang jasa kepelabuhan dan logistic In port and logistics services	Teknis Sipil Bisnis Administrasi Civil Engineering Business Administration
Hambra*	Wakil Direktur Utama Deputy President Director	57 tahun 57 years old	Pria Male	• S1 bidang Ilmu Hukum • S2 bidang Hukum Bisnis • Bachelor's degree in Law • Master's degree in Business Law	Memiliki pengalaman kerja di bidang hukum dan jasa kepelabuhan dan logistic In legal, port services, and logistics.	Hukum Bisnis Law Business
Mega Satria*	Direktur Keuangan Director of Finance	48 tahun 48 years old	Pria Male	• S1 bidang Administrasi Bisnis • S2 bidang Administrasi Bisnis • Bachelor's degree in Business Administration • Master's degree in Business Administration	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan dan penerbangan In banking and aviation.	Administrasi Bisnis Business Administration
Ihsanuddin Usman**	Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Director of Human Capital and General Affairs	56 tahun 56 years old	Pria Male	• S1 bidang Teknik Pertambangan • S2 bidang Innovation & Technology Management • Bachelor's degree in Mining Engineering • Master's degree in Innovation & Technology Management	Memiliki pengalaman kerja di bidang pertambangan dan jasa kepelabuhan dan logistic In mining, port services, and logistics.	Teknik Pertambangan Teknologi Mining Engineering Technology
Prasetyo**	Direktur Strategi Director of Strategy	55 tahun 55 years old	Pria Male	• S1 bidang Teknik Arsitektur • S2 bidang Bussiness Administration • Bachelor's degree in Architectural Engineering • Master's degree in Business Administration	Memiliki pengalaman kerja di bidang jasa kepelabuhan dan logistik In port services and logistics.	Teknik Arsitektur Administrasi Bisnis Architectural Engineering Business Administration

Tabel Keberagaman Komposisi Direksi
Diversity in Board of Directors Composition

Nama Name	**Jabatan** Position	**Usia** Age	**Jenis Kelamin** Gender	**Pendidikan** Education	**Pengalaman Kerja** Work Experience	**Keahlian** Expertise
Boy Robyanto	Direktur Manajemen Risiko Director of Risk Management	52 tahun 52 years old	Pria Male	• D3 bidang Teknik Sipil • S1 bidang Teknik Sipil • S2 bidang Manajemen • S2 Program Profesi Insinyur • Associate's degree in Civil Engineering • Bachelor's degree in Civil Engineering • Master's degree in Management • Master's degree in Professional Engineering	Memiliki pengalaman kerja di bidang jasa kepelabuhan dan logistic In port and logistics services	Teknik Sipi Manajemen Civil Engineering Management
Putut Sri Muljanto	Direktur Operasi Director of Operations	56 tahun 56 years old	Pria Male	• S1 bidang Ekonomi Manajemen • S2 bidang Manajemen • Bachelor's degree in Economics and Management • Master's degree in Management	Memiliki pengalaman kerja di bidang jasa kepelabuhan dan logistik In port and logistics services	Manajemen Management
Dwi Fatan Lilyana***	Direktur SDM dan Umum Human Resources and General Affairs Director	50 tahun 50 years old	Wanita Female	• S1 bidang Akuntansi • Bachelor's degree in Accounting	Memiliki pengalaman kerja di bidang logistic dan perdagangan In logistics and trade	Akuntansi Accounting
Drajat Sulistyo***	Direktur Komersial Director of Commerce	46 tahun 46 years old	Pria Male	• D3 bidang Teknik Sipil • S1 bidang Teknik Sipil • S2 bidang Logistic • Associate's degree in Civil Engineering • Bachelor's degree in Civil Engineering • Master's degree in Logistics	Memiliki pengalaman kerja di bidang jasa kepelabuhan In port services	Teknik Sipil Civil Engineering
Bachtiar Soeria Atmadja****	Direktur Keuangan Director of Finance	60 tahun 60 years old	Pria Male	• S1 bidang Teknik Perminyakan • S2 Teknik Perminyakan • Bachelor's degree in Petroleum Engineering • Master's degree in Petroleum Engineering	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan dan pertambangan In banking and mining	Teknik Perminyakan Petroleum Engineering
Hosadi Apriza Putra****	Direktur Pengembangan Usaha Director of Business Development	53 tahun 53 years old	Pria Male	• Sarjana Teknik • Bachelor of Engineering	Memiliki pengalaman kerja di bidang jasa kepelabuhan In port services	Teknik dan Engineering Kepelabuhanan Technic and Port Engineering

Tabel Keberagaman Komposisi Direksi
Diversity in Board of Directors Composition

Nama Name	Jabatan Position	Usia Age	Jenis Kelamin Gender	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Work Experience	Keahlian Expertise
Muhammad Suriawan Wakan****	Direktur Teknik Director of Engineering	55 tahun 55 years old	Pria Male	• S1 bidang Teknik Elektro • S2 bidang Manajemen Keuangan • Bachelor's degree in Electrical Engineering • Master's degree in Financial Management	Memiliki pengalaman kerja di bidang penerbangan In aviation	Manajemen Keuangan Financial Management

*Sehubungan dengan telah diangkat sebagai Direktur Keuangan PT Pertamina Patra Niaga pada tanggal 4 Juli 2025 maka dikukuhkan pemberhentian yang bersangkutan pada tanggal 19 September 2025.
**Berhenti menjabat sejak tanggal 25 Juni 2025
***Mulai menjabat sejak tanggal 25 Juni 2025
****Mulai menjabat sejak tanggal 19 September 2025
*In connection with his appointment as Chief Financial Officer of PT Pertamina Patra Niaga on July 4, 2025, his resignation was officially accepted on September 19, 2025.
**Ceased to hold office as of June 25, 2025
***Assumed office as of June 25, 2025
****Assumed office as of September 19, 2025

Tabel Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris
Diversity in Board of Commissioners Composition

Nama Name	Jabatan Position	Usia Age	Jenis Kelamin Gender	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Work Experience	Keahlian Expertise
Agus Suhartono	Komisaris Utama/ Independen President/ Independent Commissioner	70 tahun 70 years old	Pria Male	• Akademi Angkatan Laut • S1 bidang Ekonomi dari Naval Academy • Naval Academy • Bachelor's Degree in Economics from the Naval Academy	Memiliki pengalaman kerja di TNI Angkatan Laut In the Indonesian Navy	Ekonomi Manajemen Management Economics
Suntana	Wakil Komisaris Utama Deputy President Commissioner	59 tahun 59 years old	Pria Male	Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (SESPIMTI) Higher Staff and Leadership College (SESPIMTI)	Memiliki pengalaman kerja di Kepolisian In the police force	Ekonomi Manajemen Management Economics
Heru Sukanto*	Komisaris Independen Independent Commissioner	68 tahun 68 years old	Pria Male	• S1 bidang Hukum • S2 bidang Manajemen • Bachelor's Degree in Law • Master's Degree in Management	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan In banking	Hukum Manajemem Law Management
Jodi Mahardi	Komisaris Commissioner	48 tahun 48 years old	Pria Male	• S1 bidang Manajemen • S2 bidang International Affairs • Bachelor's Degree in Management • Master's Degree in International Affairs	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan In government	Manajemen Hubungan Internasional Management International Relations
Andus Winarno**	Komisaris Commissioner	54 tahun 54 years old	Pria Male	• S1 bidang Ekonomi • S2 bidang Ilmu Hukum • Bachelor's Degree in Economics • Master's Degree in Law	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan In government	Ekonomi Ilmu Hukum Economics Jurisprudence

Tabel Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris
Diversity in Board of Commissioners Composition

Nama Name	**Jabatan** Position	**Usia** Age	**Jenis Kelamin** Gender	**Pendidikan** Education	**Pengalaman Kerja** Work Experience	**Keahlian** Expertise
Elwi Danil	Komisaris Commissioner	65 tahun 65 years old	Pria Male	• S1 bidang Hukum • S2 bidang Hukum • S3 bidang Hukum • Bachelor's Degree in Law • Master's Degree in Law • Doctorate in Law	Memiliki pengalaman kerja di bidang Pendidikan In education	Hukum Law
Rakhman Fuadhy	Komisaris Independen Independent Commissioner	45 tahun 45 years old	Pria Male	• S1 bidang Teknik Elektro • Sekolah Bahasa Jepang • S2 bidang Teknik Mesin • Bachelor's Degree in Electrical Engineering • Japanese Language School • Master's Degree in Mechanical Engineering	Memiliki pengalaman kerja di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo At the Indonesian Embassy in Tokyo	Teknik Mesin Mechanical Engineering
Maximianus Puguh Djiwanto***	Komisaris Independent Commissioner Independen	57 tahun 57 years old	Pria Male	S1 bidang Akuntansi Bachelor's Degree in Accounting	Memiliki pengalaman kerja di bidang Lembaga jasa keuangan In financial services institutions	Akuntansi Accounting
Arief Poyuono****	Komisaris Independen Independent Commissioner	54 tahun 54 years old	Pria Male	• S1 bidang Ekonomi • S2 bidang Ilmu Komunikasi • Bachelor's Degree in Economics • Master's Degree in Communication Studies	Memiliki pengalaman kerja di Metro Kajang Berhad dan PT Argo Artha Surya At Metro Kajang Berhad and PT Argo Artha Surya	Ekonomi, Ilmu Komunikasi Economics, Communication Studies
Ilhamsyah****	Komisaris Commissioner	53 tahun 53 years old	Pria Male	D3 bidang Akuntansi Diploma in Accounting	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan In government	Akuntansi Accounting

NOMINASI DAN REMUNERASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

KEBIJAKAN DAN PROSEDUR NOMINASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dalam proses nominasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-3/MBU/03/2023 Tahun 2023 Tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Bakal calon Dewan Komisaris dan Direksi diusulkan melalui Dewan Komisaris yang dibantu oleh Komite Remunerasi dan Nominasi. Bakal calon yang akan ditetapkan menjadi calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah seorang yang telah dinyatakan memenuhi Persyaratan formal, persyaratan materiil dan persyaratan lain serta lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK). Penetapan Direksi dan Dewan dilakukan melalui Keputusan RUPS.

BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS NOMINATION AND REMUNERATION

POLICY AND PROCEDURE OF BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS NOMINATION

In the nomination process of Board of Commissioners and Board of Directors, the Company refers to the Regulation of Minister of State-Owned Enterprises No. Per-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises. Candidates for Board of Commissioners and Board of Directors are proposed through Board of Commissioners, assisted by Remuneration and Nomination Committee. The candidate who will be determined as a candidate for Board of Commissioners and Board of Directors is a person who has been declared to have fulfilled the formal requirements, material requirements and other requirements and passed the Fit and Proper Test (UKK). Board of Directors and Board of Commissioners are appointed through a GMS Resolution.

KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PENETAPAN REMUNERASI

Dasar Penetapan Remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi merupakan kewenangan Pemegang Saham dan ditetapkan dalam RUPS yang formulasinya mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara dan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-181/MBU/07/2023 tanggal 4 Juli 2023 tentang Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara Tahun 2023. Prosedur penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi berawal dari tahap pengusulan yang diajukan oleh pihak Direksi. Direksi meminta pihak ketiga (konsultan) untuk melakukan *review* remunerasi Direktur Utama. Hasil *review* dari konsultan tersebut diajukan kepada Dewan Komisaris guna mendapatkan rekomendasi. Dewan Komisaris dengan dibantu oleh Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan telaah dan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi. Rekomendasi Dewan Komisaris tersebut disampaikan kepada Pemegang Saham untuk mendapatkan persetujuan dalam RUPS.

POLICY AND PROCEDURE IN DETERMINING REMUNERATION

The basis for determining remuneration for members of Board of Commissioners and Board of Directors is the authority of Shareholders and is determined in the GMS, the formulation of which refers to Regulation of the Minister of SOEs Number PER-3/MBU/03/2023 dated March 20, 2023 concerning Organs and Human Capital of State-Owned Enterprises and Decree of the Minister of SOEs Number SK-181/MBU/07/2023 dated July 4, 2023 concerning Determination of Income of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of StateOwned Enterprises in 2023. The remuneration determination procedure for Board of Commissioners and Board of Directors starts from the proposal stage submitted by Board of Directors. Board of Directors requests a third party (consultant) to review the remuneration of President Director. The review result from the consultant is submitted to Board of Commissioners for recommendation. Board of Commissioners, assisted by Nomination and Remuneration Committee, reviews and evaluates the remuneration policy. Board of Commissioners' recommendations are then submitted to the Shareholders for approval at the GMS.

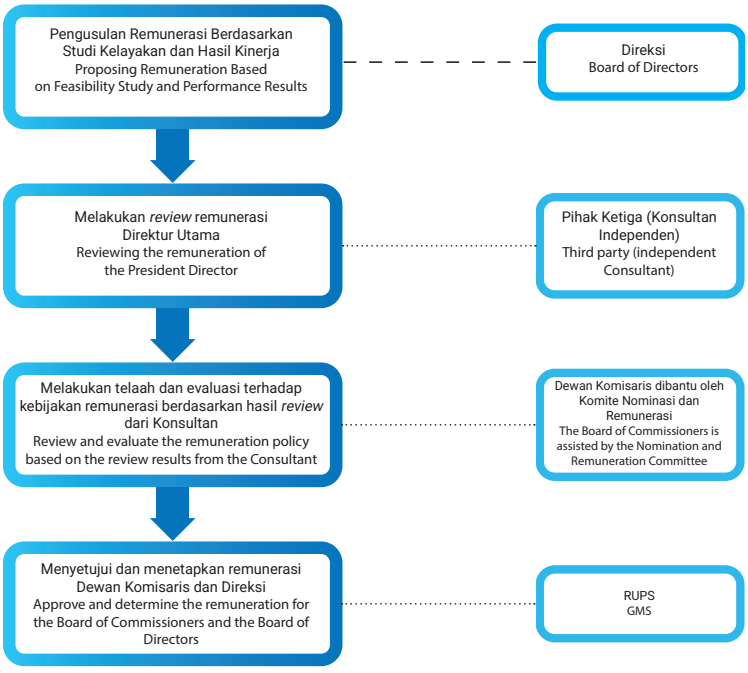

INDIKATOR PENETAPAN REMUNERASI

Penetapan Penghasilan yang berupa Gaji atau Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas yang bersifat tetap dilakukan dengan mempertimbangkan faktor skala usaha, faktor kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan Perseroan, kemampuan jangka panjang Perseroan dan faktor-faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

INDICATORS OF REMUNERATION DETERMINATION

Income in the form of fixed Salary or Honorarium, Allowances and Facilities is determined by considering business scale factor, business complexity factor, inflation rate, conditions and financial capabilities of the Company, the Company's long-term prospects, and other relevant factors, and must not conflict with statutory regulations.

STRUKTUR DAN JUMLAH NOMINAL/ KOMPONEN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Struktur remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut.

STRUCTURE AND AMOUNT OF BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS REMUNERATION

The remuneration structure of Board of Commissioners and Board of Directors is as follows.

Jenis Penghasilan Income Type	**Keputusan** Decision	
	Dewan Komisaris Board of Commissioners	**Direksi** Board of Directors
Honorarium/Gaji Honorarium/Salary	• Honorarium Komisaris Utama : 45% dari Direktur Utama • Anggota Dewan Komisaris : 90% dari Komisaris Utama • Honorarium of President Commissioner : 45% of President Director • Members of Board of Commissioners : 90% of President Commissioner.	• Gaji Direktur Utama : 100% • Wakil Direktur Utama: 90% dari gaji DIrektur Utama • Anggota Direksi lainnya 85% dari gaji Direktur Utama. • President Director Salary : 100% • Vice President Director : 90% of President Director's salary • Other members of Board of Directors : 85% of President Director's salary.
Tunjangan Allowances		
Tunjangan Hari Raya Keagamaan Religious Holiday Allowance	1 (satu) kali honorarium 1 (one) time honorarium	1 (satu) kali gaji 1 (one) time salary
Asuransi Purna Jabatan Post-Service Insurance	Premi yang ditanggung oleh perusahaan sebesar 25% dari gaji dalam 1 tahun Premium borne by the Company is 25% of salary in 1 year	Premi yang ditanggung oleh perusahaan sebesar 25% dari gaji dalam 1 tahun Premium borne by the Company is 25% of salary in 1 year
Tunjangan perumahan Housing Allowance	-	Rp27.000.000 per bulan Rp27,000,000 per month
Tunjangan Transportasi Transport Allowance	20% dari honorarium per bulan 20% of honorarium per month	-
Fasilitas Facility		
Fasilitas Kendaraan Vehicle Facility	-	1 (satu) unit beserta biaya pemeliharaan dan biaya operasional, dengan memperhatikan kondisi keuangan perusahaan. 1 (one) unit along with maintenance and operational costs, taking into account the Company's financial condition
Fasilitas Kesehatan Medical Facility	Dalam bentuk asuransi Kesehatan atau penggantian biaya pengobatan (at cost) Health insurance or reimbursement of medical expenses (at cost)	Dalam bentuk asuransi Kesehatan atau penggantian biaya pengobatan (at cost) Health insurance or reimbursement of medical expenses (at cost)
Fasilitas Bantuan Hukum Legal Assistance Facility	Sebesar pemakaian (at cost) At cost	Sebesar pemakaian (at cost) At cost

Jenis Penghasilan Income Type	**Keputusan** Decision	
	Dewan Komisaris Board of Commissioners	**Direksi** Board of Directors
Tantiem/Insentif Kinerja Tantiem/Performance Incentive	Pemberian Tantiem/IK diberikan secara proporsional berdasarkan capaian kinerja pada tahun yang bersangkutan serta mempertimbangkan capaian kontribusi dividen kepada Negara atau indikator lainnya yang ditetapkan oleh RUPS/Menteri dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun yang bersangkutan. The granting of Tantiem/IK is given proportionally based on performance achievements in the year concerned and considering the achievement of dividend contributions to the State or other indicators determined by the GMS/ Minister in the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for the year concerned.	Pemberian Tantiem/IK diberikan secara proporsional berdasarkan capaian kinerja pada tahun yang bersangkutan serta mempertimbangkan capaian kontribusi dividen kepada Negara atau indikator lainnya yang ditetapkan oleh RUPS/Menteri dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun yang bersangkutan. The granting of Tantiem/IK is given proportionally based on performance achievements in the year concerned and considering the achievement of dividend contributions to the State or other indicators determined by the GMS/Minister in the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for the year concerned.

Nominal remunerasi masing-masing Direksi pada tahun 2025 adalah sebagai berikut.

The nominal remuneration for each member of the Board of Directors in 2025 is as follows.

Nama Name	**Jabatan** Position	**Gaji** Honorarium	**Tunjangan** Allowance	**THR** Holiday Allowance	**Tantiem**	**Total**
Arif Suhartono	Direktur Utama President Director	√	√	√	-	6.730.000.000
Hambra*	Wakil Direktur Utama Deputy President Director	√	√	√	-	3.886.000.000
Mega Satria*	Direktur Keuangan Director of Finance	√	√	√	-	3.098.790.323
Ihsanuddin Usman**	Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Director of Human Capital and General Affairs	√	√	√	-	2.768.416.667
Prasetyo**	Direktur Strategi Director of Strategy	√	√	√	-	2.964.500.000
Boy Robyanto	Direktur Manajemen Risiko Director of Risk Management	√	√	√	-	5.770.000.000
Putut Sri Muljanto	Direktur Operasi Director of Operations	√	√	√	-	5.770.000.000
Dwi Fatan Lilyana***	Direktur SDM dan Umum Human Resources and General Affairs Director	√	√	-	-	2.805.500.000
Drajat Sulistyo***	Direktur Komersial Director of Commerce	√	√	-	-	2.805.500.000
Bachtiar Soeria Atmadja****	Direktur Keuangan Director of Finance	√	√	-	-	1.538.500.000

Nama Name	Jabatan Position	Gaji Honorarium	Tunjangan Allowance	THR Holiday Allowance	Tantiem	Total
Hosadi Apriza Putra****	Direktur Pengembangan Usaha Director of Business Development	√	√	-	-	
Muhammad Suriawan Wakan****	Direktur Teknik Director of Engineering	√	√	-	-	1.538.500.000

*Sehubungan dengan telah diangkat sebagai Direktur Keuangan PT Pertamina Patra Niaga pada tanggal 4 Juli 2025 maka dikukuhkan pemberhentian yang bersangkutan pada tanggal 19 September 2025.
**Berhenti menjabat sejak tanggal 25 Juni 2025
***Mulai menjabat sejak tanggal 25 Juni 2025
****Mulai menjabat sejak tanggal 19 September 2025
*In connection with his appointment as Chief Financial Officer of PT Pertamina Patra Niaga on July 4, 2025, his resignation was officially accepted on September 19, 2025.
**Ceased to hold office as of June 25, 2025
***Assumed office as of June 25, 2025
****Assumed office as of September 19, 2025

Nominal remunerasi masing-masing Dewan Komisaris pada tahun 2025 adalah sebagai berikut.

The nominal remuneration for each member of the Board of Commissioners in 2025 is as follows.

Nama Name	Jabatan Position	Gaji Honorarium	Tunjangan Allowance	THR Holiday Allowance	Tantiem	Total
Agus Suhartono	Komisaris Utama/ Independen President/Independent Commissioner	√	√	√	-	3.312.000.000
Suntana	Wakil Komisaris Utama Deputy President Commissioner	√	√	√	-	3.128.000.000
Heru Sukanto*	Komisaris Independen Independent Commissioner	√	√	√	-	
Jodi Mahardi	Komisaris Commissioner	√	√	√	-	2.980.800.000
Andus Winarno**	Komisaris Commissioner	√	√	√	-	
Elwi Danil	Komisaris Commissioner	√	√	√	-	2.980.800.000
Rakhman Fuadhy	Komisaris Independen Independent Commissioner	√	√	√	-	2.980.800.000
Maximianus Puguh Djiwanto***	Komisaris Independent Commissioner Independen	√	√	-	-	1.691.280.000
Arief Poyuono****	Komisaris Independen Independent Commissioner	√	√	√	-	1.308.960.000
Ilhamsyah****	Komisaris Commissioner	√	√	-	-	1.691.280.000

*Berhenti menjabat sejak 25 Juni 2025
**Berhenti menjabat sejak 19 September 2025
***Mulai menjabat sejak 25 Juni 2025
****Mulai menjabat sejak 19 September 2025
*Ceased to hold office as of June 25, 2025
**Ceased to hold office as of September 19, 2025
***Assumed office as of June 25, 2025
****Assumed office as of September 19, 2025

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris diberi kewenangan untuk membentuk organ-organ pendukung dalam rangka mendorong efektivitas fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi. Kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Komisaris dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko.

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Sekretariat Dewan Komisaris diangkat untuk membantu kelancaran tugas Dewan Komisaris, khususnya di bidang kesekretariatan dan penghubung Dewan Komisaris dengan pihak lain, termasuk Direksi.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Sekretaris Dewan Komisaris menjalankan tugas-tugas sebagai berikut:
1. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (*briefing sheet*) Dewan Komisaris;
2. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan;
3. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya;
4. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris;
5. Menyusun rancangan Laporan-Laporan Dewan Komisaris.
6. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris.

Sekretaris Dewan Komisaris juga melaksanakan tugas lain berupa:
1. Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip GCG;
2. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
3. Mengkoordinasikan anggota Komite, jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris;
4. Bertindak sebagai penghubung (*liasion officer*) Dewan Komisaris dengan pihak lain.

ORGANS AND COMMITTEES UNDER BOARD OF COMMISSIONERS

Board of Commissioners is authorized to establish supporting organs in order to encourage the effectiveness of its supervisory and advisory functions to the Board of Directors. The policy refers to the Ministry of SOE Regulation No. PER-09/MBU/2012 concerning Amendments to the Ministry of SOE Regulation No. PER-01/MBU/2011 concerning Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises and the Ministry of SOE Regulation No. PER-12/MBU/2012 concerning Supporting Organs of Boards of Commissioners/Supervisory Boards of State-Owned Enterprises. In carrying out its duties, Board of Commissioners is assisted by Secretary of Board of Commissioners, Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, and GCG and Risk Management Monitoring Committee.

SECRETARY OF BOARD OF COMMISSIONERS

Secretary of Board of Commissioners is appointed to assist the smooth running of Board of Commissioners' duties, particularly in the field of secretarial and liaison between Board of Commissioners and other parties, including the Board of Directors.

SECRETARY OF BOARD OF COMMISSIONERS DUTIES AND RESPONSIBILITIES

Secretary of Board of Commissioners carries out the following duties:
1. Prepare the meetings, including the Board of Commissioners' briefing sheet;
2. Prepare the minutes of Board of Commissioners meeting in accordance with the provisions;
3. Administering the Board of Commissioners' documents, both incoming letters, outgoing letters, minutes of meetings and other documents;
4. Prepare the Board of Commissioners Work Plan and Budget;
5. Drafting the Board of Commissioners Reports.
6. Carry out other duties from the Board of Commissioners.

Secretary of Board of Commissioners also carries out other duties in the form of:
1. Ensuring that Board of Commissioners complies with laws and regulations and applies GCG principles;
2. Provide information needed by Board of Commissioners periodically and/or at any time when requested;
3. Coordinating Committee members, if necessary in order to expedite the duties of Board of Commissioners;
4. Act as a liaison officer for Board of Commissioners with other parties.

PROFIL SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

SECRETARY OF BOARD OF COMMISSIONERS PROFILE

Riwayat Pendidikan Educational History	• Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Program Diploma III Akuntansi (2006) • S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (2009) • S2 Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (2014)4 • State College of Accountancy, Diploma III Program in Accounting (2005) • Bachelor's Degree in Economics, Faculty of Economics, University of Indonesia (2010) • Master's Degree in Management, Faculty of Economics, University of Indonesia (2024)
Pengalaman Kerja Work Experience	• Analis SDM Aparatur Muda (2021-2022) • Kepala bagian Perencanaan dan Manajemen Kinerja (2022 – sekarang) • Junior Civil Servant Human Resources Analyst (2021-2022) • Head of Planning and Performance Management (2022 – present)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 7/KEP-DK/PI/X-2021 Board of Commissioners Decree Number 12/KEP-DK/PI/XII-2024 dated December 16, 2024
Jabatan Rangkap Concurrent Positions	Subkoordinator Bidang Industri Mineral dan Batubara 1B1, Kementerian BUMN (2020-sekarang) Head of Planning and Performance Management

PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

COMPETENCY IMPROVEMENT PROGRAM FOR SECRETARY OF BOARD OF COMMISSIONERS

Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi/Pelatihan	**Waktu Pelaksanaan**	**Penyelenggara**
Sertifikasi CAFG (Certified Anti Fraud Governance) CAFG (Certified Anti-Fraud Governance) Certification	Kamis-Jumat, 18-19 September 2025, Ruang Rapat Amanah lantai 3, Kantor Pusat Pelindo Tower Thursday-Friday, September 18-19, 2025, Amanah Meeting Room, 3rd Floor, Pelindo Tower Head Office	PT GRC Management

PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Selama tahun 2025, Sekretaris Dewan Komisaris telah menjalankan tugas-tugas sebagai berikut:

1. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (*briefing sheet*) Dewan Komisaris;
2. Menyusun risalah rapat Dewan Komisaris.

DUTIES IMPLEMENTATION OF SECRETARY OF BOARD OF COMMISSIONERS

Throughout 2025, the Secretary of Board of Commissioners performed the following duties:

1. Preparing meetings, including briefing sheets for the Board of Commissioners;
2. Preparing minutes of Board of Commissioners meetings.

3. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya.
4. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris.
5. Menyusun rancangan Laporan-Laporan Dewan Komisaris.

KOMITE AUDIT

Komite Audit merupakan organ pendukung yang berada di bawah Dewan Komisaris yang dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan IPC sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Pembentukan Komite Audit oleh Dewan Komisaris dilakukan dengan mengacu pada:

1. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tanggal 4 Oktober 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Menteri BUMN No PER-3/MBU/03/2023 Tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
5. Anggaran Dasar Perseroan

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT

Tugas-tugas Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Komite Audit bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris.
2. Komite Audit bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam laporan dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
3. Komite Audit membantu Dewan Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Satuan Pengawasan Intern (SPI).
4. Komite Audit menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh SPI maupun auditor KAP.
5. Komite Audit memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan pengendalian intern serta pelaksanaannya.
6. Komite Audit memastikan telah terdapat prosedur reviu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan.
7. Komite Audit melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris.
8. Komite Audit mengusulkan kepada Dewan Komisaris calon auditor KAP Laporan Keuangan Tahunan disertai alasan pencalonan dan besarnya honorarium/imbal jasa yang diusulkan untuk auditor KAP tersebut.
9. Komite Audit memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas calon Kepala SPI.

3. Administering Board of Commissioners documents, including incoming and outgoing letters, meeting minutes, and other documents.
4. Preparing the Board of Commissioners' Work Plan and Budget.
5. Preparing drafts of the Board of Commissioners' Reports

AUDIT COMMITTEE

Audit Committee is a supporting organ under Board of Commissioners, which is formed to assist Board of Commissioners in supervising the Company's management in accordance with the principles of Good Corporate Governance (GCG). Audit Committee is formed by Board of Commissioners with reference to:

1. Law No. 19 of 2003 dated October 4, 2003 concerning StateOwned Enterprises;
2. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
3. Regulation of the Minister of SOE No PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Capital of State-Owned Enterprises;
4. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of StateOwned Enterprises;
5. The Company's Articles of Association.

AUDIT COMMITTEE DUTIES AND RESPONSIBILITIES

The duties of Audit Committee are as follows:

1. Audit Committee works collectively in carrying out its duties to assist Board of Commissioners.
2. Audit Committee is independent both in carrying out its duties and in reports and being responsible to Board of Commissioners.
3. Audit Committee assists the Board of Commissioners in ensuring the effectiveness of internal control system and the effectiveness of duties of auditors of Public Accounting Firm (KAP) and Internal Audit Unit (SPI).
4. Audit Committee assesses the implementation of activities and the results of audits carried out by SPI and KAP auditors.
5. Audit Committee provides recommendations regarding the improvement of internal control and its implementation.
6. Audit Committee ensures that there is a satisfactory review procedure for all information issued by the Company.
7. Audit Committee identifies matters that require Board of Commissioners' attention as well as other tasks assigned by Board of Commissioners.
8. Audit Committee proposes to Board of Commissioners a candidate for KAP to audit the Annual Financial Statements along with the reasons for nomination and proposed honorium/fee for KAP auditor.
9. Audit Committee provides recommendations to the Board of Commissioners regarding candidates for Head of SPI.

10. Tugas Khusus dari Dewan Komisaris:
    a. Pemberian tugas khusus kepada Komite Audit oleh Dewan Komisaris dilakukan dengan perintah tertulis yang memuat:
        - Nama yang diberi tugas;
        - Sifat penugasan;
        - Lingkup pekerjaan;
        - Tujuan dan sasaran pekerjaan;
        - Jangka waktu penugasan.
    b. Lingkup pekerjaan tugas khusus bagi Komite Audit sepenuhnya ditentukan oleh Dewan Komisaris sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
    c. Dalam melaksanakan tugas khusus Komite Audit dapat:
        - Melakukan *review* terhadap semua catatan, dokumen dan informasi lainnya yang diperlukan termasuk notulen rapat Dewan Direksi dan rapat Dewan Komisaris jika dianggap perlu.
        - Melakukan audit investigasi dapat bekerjasama dengan SPI atau meminta bantuan tenaga ahli atau konsultan untuk membantu Komite Audit.
    d. Komite Audit menyampaikan laporan pelaksanaan tugas khusus kepada Dewan Komisaris.

Tanggungjawab Komite Audit adalah sebagai berikut:
1. Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
2. Pertanggungjawaban Komite Audit kepada Dewan Komisaris disampaikan dalam laporan sebagai berikut:
    a. Laporan tahunan pelaksanaan tugas Komite Audit;
    b. Laporan Triwulanan pelaksanaan tugas Komite Audit;
    c. Laporan untuk setiap pelaksanaan tugas khusus Komite Audit.
3. Komite Audit bertanggungjawab menjaga kerahasian dokumen, data dan informasi Perseroan.

WEWENANG KOMITE AUDIT

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit berwenang:
1. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan;
2. Memasuki pekarangan, gedung dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan;
3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;
4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Perseroan.

PIAGAM KOMITE AUDIT

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit mengacu pada Piagam Komite Audit terakhir ditetapkan oleh Dewan Komisaris melalui Keputusan Dewan Komisaris No. 06/KEP-DK/PI/VII-2022 tanggal 19 Juli 2022 tentang Penetapan Piagam (Charter) Komite Audit, Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko dan

10. Special Assignment from Board of Commissioners:
    a. Special tasks assigned to Audit Committee by Board of Commissioners is carried out with a written order containing:
        - Name of assignee;
        - Nature of assignment;
        - Scope of work;
        - Goals and objectives of the work;
        - Duration of assignment.
    b. The scope of work for special tasks of Audit Committee is fully determined by Board of Commissioners as long as does not against applicable laws and regulations.
    c. In carrying out special tasks, Audit Committee may:
        - Reviewing all necessary records, documents and other information including the minutes of Board of Directors meeting and Board of Commissioners meeting if deemed necessary.
        - Conducting an investigative audit by cooperating with SPI or ask for assistance from experts or consultants to assist Audit Committee.
    d. Audit Committee submits a report on the implementation of special tasks to Board of Commissioners.

The responsibilities of Audit Committee are as follows:
1. Audit Committee is responsible to Board of Commissioners.
2. The accountability of Audit Committee to Board of Commissioners is presented in the following report:
    a. Annual report on the implementation of Audit Committee duties;
    b. Quarterly Report on the implementation of Audit Committee duties;
    c. Reports for each implementation of special tasks of Audit Committee.
3. Audit Committee is responsible for maintaining the confidentiality of the Company's documents, data and information.

AUDIT COMMITTEE AUTHORITIES

In carrying out its duties, Audit Committee is authorized to:
1. Examine books, letters, and other documents, check cash for verification purposes and other securities and examine the Company's assets;
2. Entering yards, buildings and offices used by the Company;
3. Requesting an explanation from Board of Directors and/or other officials regarding all issues related to the management of the Company;
4. Acknowledge all policies and actions that have been and will be implemented by the Company.

AUDIT COMMITTEE CHARTER

In carrying out its duties and responsibilities, the Audit Committee refers to the latest Audit Committee Charter established by the Board of Commissioners through the Decree of Board of Commissioners No. 06/KEP-DK/PI/VII-2022 dated July 19, 2022 concerning Determination of the Charter of Audit Committee, GCG and Risk Management

Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia. Dalam Piagam tersebut memuat ketentuan yang harus dipatuhi pembentukan dan pelaksanaan kegiatan Komite Audit agar dapat bekerja secara independen, objektif, mandiri, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Piagam tersebut ditata dalam susunan bagian sebagai berikut:

1. Landasan Hukum;
2. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota;
3. Tugas;
4. Kewenangan;
5. Persyaratan Keanggotaan;
6. Tanggung Jawab;
7. Rapat;
8. Laporan;
9. Akses Kerahasiaan Informasi;
10. Rencana Kerja dan Anggaran;
11. Penghasilan Anggota;
12. Pengembangan Profesional Lanjutan;
13. Penggunaan Tenaga Ahli;
14. Penilaian Kinerja;
15. Hubungan Kelembagaan;
16. Lain-Lain;
17. Penutup.

Monitoring Committee and Nomination and Remuneration Committee of the Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia. The Charter contains provisions that must be complied with in the establishment and implementation of Audit Committee activities so that they can work independently, objectively, independently, transparently, and can be accounted for. The Charter is organized in the following sections:

1. Legal Basis;
2. Appointment and Dismissal of Members;
3. Duties;
4. Authority;
5. Membership Requirements;
6. Responsibilities;
7. Meetings;
8. Report;
9. Access to Confidential Information;
10. Work Plan and Budget;
11. Member's Income;
12. Advanced Professional Development;
13. Use of Experts;
14. Performance Assessment;
15. Institutional Relationship;
16. Others;
17. Closing

MASA JABATAN KOMITE AUDIT

Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

AUDIT COMMITTEE TENURE

The tenure for members of Audit Committee who are not members of the Company's Board of Commissioners is a maximum of 3 (three) years and can be extended once for another 2 (two) years, without prejudice to the right of Board of Commissioners to dismiss them at any time.

STRUKTUR, KEANGGOTAAN DAN KEAHLIAN KOMITE AUDIT

STRUCTURE, MEMBERSHIP AND EXPERTISE OF AUDIT COMMITTEE

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian	Dasar Pengangkatan
Maximianus Puguh Djiwanto	Ketua Chairman	Komisaris Independen Independent Commissioner	Akuntansi Accounting	SK Pengangkatan No.05/KEP-DK/PI/XVII-2025 tgl 04 Juli 2025 Appointment Decree No. 05/KEP-DK/PI/XVII-2025 dated July 4, 2025
Rakhman Fuadhy Kurniawan	Wakil Ketua Vice Chairman	Komisaris Commissioner	Engineering Engineering	SK Pengangkatan No.14/KEP-DK/PI/XII-2024 tgl 27 Desember 2024 Appointment Decree No. 14/KEP-DK/PI/XII-2024 dated December 27, 2024
Ahmad Zakie Mubarrok	Anggota Member	Pihak Independen Independent Party	Akuntansi, Audit Accounting, Auditing	SK Pengangkatan No.05/KEP-DK/PI.II/III-2021 tanggal 1 Maret 2021 Appointment Decree No. 05/KEP-DK/PI.II/III-2021 dated March 1, 2021
Sofia Chairunnisa	Anggota Member	Pihak Independen Independent Party	Akuntansi, Audit Accounting, Auditing	SK Pengangkatan No.04/KEP-DK/PI/X-2021 tgl 15 Oktober 2021 Appointment Decree No. 04/KEP-DK/PI/X-2021 dated October 15, 2021

PROFIL KOMITE AUDIT

Profil Komite Audit per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

AUDIT COMMITTEE PROFILE

The Audit Committee profile as of December 31, 2025, is as follows.

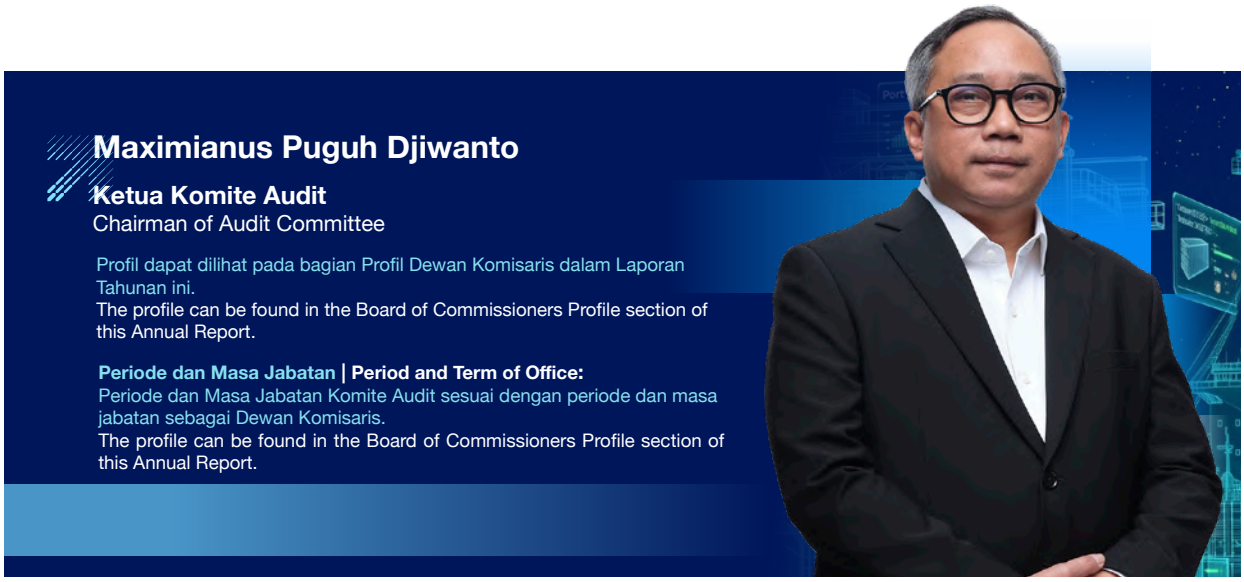

Maximianus Puguh Djiwanto

Ketua Komite Audit
Chairman of Audit Committee

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.
The profile can be found in the Board of Commissioners Profile section of this Annual Report.

Periode dan Masa Jabatan | Period and Term of Office:
Periode dan Masa Jabatan Komite Audit sesuai dengan periode dan masa jabatan sebagai Dewan Komisaris.
The profile can be found in the Board of Commissioners Profile section of this Annual Report.

Rakhman Fuadhy Kurniawan

Wakil Ketua Komite Audit
Vice Chairman of Audit Committee

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.
The profile can be found in the Board of Commissioners Profile section of this Annual Report.

Periode dan Masa Jabatan | Period and Term of Office:
Periode dan Masa Jabatan Komite Audit sesuai dengan periode dan masa jabatan sebagai Dewan Komisaris.
Audit Committee's period and term of office correspond to the period and term of office of Board of Commissioners.

Ahmad Zakie Mubarrok

Anggota Komite Audit
Member of Audit Committee

Warga Negara Indonesia
Indonesian

Bandung
Bandung

Wonosobo, 16 Februari 1985/40 tahun per Desember 2025
Wonosobo, February 16, 1985/40 years old as of December 2025

Periode Pertama : 1 Maret 2021 – 29 Februari 2024
First Term: March 1, 2021 – February 29, 2024
Periode Kedua : 1 Maret 2024 – 28 Februari 2026
Second Term: March 1, 2024 – February 28, 2026

Riwayat Pendidikan Educational History	• Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Padjajaran (2007) • Magister Akuntansi, Akuntansi Sektor Publik Universitas Gadjah Mada (2012) • Bachelor of Economics, Accounting, Padjajaran University (2007) • Master of Accounting, Public Sector Accounting, Gadjah Mada University (2012)
Sertifikasi Certifications	• Certified Public Accountant (CPA) from Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) • Certified in Audit Committee Practices (CACP) from Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) • Certified Auditor under The Audit Board of the Republic of Indonesia (Badan Pemeriksa Keuangan/BPK RI) • Certified Fraud Examiner (CFE) from Association of Certified Fraud Examiner (ACFE) • Certified Public Accountant (CPA) from the Indonesian Institute of Certified Public Accountants (IAPI) • Certified in Audit Committee Practices (CACP) from the Indonesian Audit Committee Association (IKAI) • Certified Auditor under the Audit Board of the Republic of Indonesia (Supreme Audit Agency/BPK RI) • Certified Fraud Examiner (CFE) from the Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)
Pengalaman Kerja Work Experience	• Dosen Tetap Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran (2015 – sekarang) • Associate Partner KAP Jojo Sunarjo dan Rekan Cabang Bandung (2018 – sekarang) • Komite Audit PT Perkebunan Nusantara VIII (2014 – 2017) • Komite Pemantau Manajemen Risiko PT Perkebunan Nusantara VIII (2017-2019) • Komite Audit PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk (2019 – 2021) • Komite Audit PT Pupuk Kujang (2019 – 2021) • Komite Audit PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2021 – sekarang) • Permanent Lecturer, Department of Accounting, Faculty of Economics and Business, Padjajaran University (2015–present) • Associate Partner, Public Accounting Firm Jojo Sunarjo and Partners, Bandung Branch (2018–present) • Audit Committee of PT Perkebunan Nusantara VIII (2014–2017) • Risk Management Monitoring Committee of PT Perkebunan Nusantara VIII (2017-2019) • Audit Committee of PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk (2019-2021) • Audit Committee of PT Pupuk Kujang (2019-2021) • Audit Committee of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2021-present)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	• Keputusan Dewan Komisaris Nomor 05/KEP-DK/PI.II/III-2021 tanggal 1 Maret 2021 • Keputusan Dewan Komisaris Nomor 05/KEP-DK/PI.II/II-2024 tanggal 23 Februari 2024 • Board of Commissioners Decision Number 05/KEP-DK/PI.II/III-2021 dated March 1, 2021 • Board of Commissioners Decision Number 05/KEP-DK/PI.II/II-2024 dated February 23, 2024
Jabatan Rangkap Concurrent Positions	Dosen Tetap Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran (2012 – sekarang) Permanent Lecturer, Department of Accounting, Faculty of Economics and Business, Padjadjaran University (2012-present)

Sofia Chairunnisa

Anggota Komite Audit
Member of Audit Committee

Warga Negara Indonesia
Indonesian

Bandung
Bandung

Jakarta, 5 Agustus 1986/39 tahun per Desember 2025
Jakarta, August 5, 1986/39 years old as of December 2025

Periode Pertama : 1 Maret 2021 – 29 Februari 2024
First Term: March 1, 2021 – February 29, 2024
Periode Kedua : 1 Maret 2024 – 28 Februari 2026
Second Term: March 1, 2024 – February 28, 2026

Riwayat Pendidikan Educational History	• Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Indonesia (2009) • Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada (2022) • Bachelor of Economics, Accounting, University of Indonesia (2009) • Master of Management, Gadjah Mada University (2022)
Sertifikasi Certifications	• Certified Auditor under The Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI) • Certified Professional Auditor of IndonesiaChartered Accountant (2024) oleh Ikatan Akuntan Indonesia • Chartered Accountant (2024) oleh Ikatan Akuntan Indonesia • Certified Auditor under the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI) • Certified Professional Auditor of Indonesia, Chartered Accountant (2024) by the Indonesian Institute of Accountants • Chartered Accountant (2024) by the Indonesian Institute of Accountants
Pengalaman Kerja Work Experience	• Audit Manager KAP Bing Santrio & Eny (Deloitte Indonesia) (2009 – 2018) • Financial, Accounting and Tax Manager PT Steadfast Marine Tbk. (2018) • Business Analyst Manager PT Maxima Integra Investama (2019) • Accounting & Tax Manager PT Sumber Hidup Sehat (2019 – 2020) • Audit Manager KAP Gani Sigiro Handayani (Grant Thornton Indonesia) (2020 – sekarang) • Audit Manager, KAP Bing Santrio & Eny (Deloitte Indonesia) (2009–2018) • Financial, Accounting, and Tax Manager, PT Steadfast Marine Tbk. (2018) • Business Analyst Manager, PT Maxima Integra Investama (2019) • Accounting & Tax Manager, PT Sumber Hidup Sehat (2019 – 2020) • Audit Manager, Public Accounting Firm Gani Sigiro Handayani (Grant Thornton Indonesia) (2020 – present)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 4/KEP-DK/PI/X-2-21 tanggal 15 Oktober 2021 Keputusan Dewan Komisaris Nomor 05/KEP-DK/PI.II/II-2024 tanggal 23 Februari 2024 Board of Commissioners Decree Number 4/KEP-DK/PI/X-2-21 dated October 15, 2021 Board of Commissioners Decree Number 05/KEP-DK/PI.II/II-2024 dated February 23, 2024
Periode dan Masa Jabatan Period and Term of Office	Periode Pertama : 15 Oktober 2021 – 31 Oktober 2024 Periode Kedua : 1 Maret 2024 – 28 Februari 2026 First Term: October 15, 2021 – October 31, 2024 Second Term: March 1, 2024 – February 28, 2026
Jabatan Rangkap Concurrent Positions	Audit Manager KAP Gani Sigiro Handayani (Grant Thornton Indonesia) (2020 – sekarang) Audit Manager, Public Accounting Firm Gani Sigiro Handayani (Grant Thornton Indonesia) (2020 – present)

KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN KERJA KOMITE AUDIT

EDUCATIONAL QUALIFICATIONS AND WORK EXPERIENCE OF AUDIT COMMITTEE

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Audit
Educational Qualifications and Work Experience of Audit Committee

Nama Name	Jabatan Position	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Work experience
Maximianus Puguh Djiwanto	Ketua Chairman	S1 Bidang Akuntansi Bachelor's Degree in Accounting	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan Work experience in financial services institutions

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Audit
Educational Qualifications and Work Experience of Audit Committee

Nama Name	Jabatan Position	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Work experience
Rakhman Fuadhy Kurniawan	Wakil Ketua Vice Chairman	• S1 bidang Teknik Elektro • Sekolah Bahasa Jepang • S2 bidang Teknik Mesin • Bachelor's Degree in Electrical Engineering • Japanese Language School • Master's Degree in Mechanical Engineering	Memiliki pengalaman kerja di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo Work experience at the Indonesian Embassy in Tokyo
Ahmad Zakie Mubarrok	Anggota Member	• Sarjana Ekonomi • Magister Akuntansi • Bachelor's Degree in Economics • Master's Degree in Accounting	Memiliki pengalaman kerja di bidang akuntansi dan auditing Work experience in accounting and auditing
Sofia Chairunnisa	Anggota Member	• Sarjana Akuntansi • Magister Manajemen • Bachelor's Degree in Accounting • Master's Degree in Management	Memiliki pengalaman kerja di bidang keuangan, akuntansi dan auditing Work experience in finance, accounting, and auditing

INDEPENDENSI KOMITE AUDIT

Komite Audit melaksanakan fungsi dan tugasnya secara profesional dan independen, tanpa campur tangan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan Piagam Komite Audit, kualifikasi independensi dari anggota Komite Audit harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

AUDIT COMMITTEE INDEPENDENCE

Audit Committee carries out its functions and duties professionally and independently, without interference from any party that is not in accordance with the laws and regulations. In accordance with the Audit Committee Charter, the independence qualifications of members of Audit Committee must meet the following criteria:

Tabel Independensi Komite Audit
Audit Committee Independence

Aspek Independensi Independence Aspect	Maximianus Puguh Djiwanto	Rakhman Fuadhy Kurniawan	Ahmad Zakie Mubarrok	Sofia Chairunnisa
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Has no financial relationship with Board of Commissioners and Board of Directors	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi Has no managerial relationship in the Company, subsidiary, or affiliated Company	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan Does not have share ownership relationship in the Company	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit Does not have family relationship with Board of Commissioners, Board of Directors, and/or fellow members of Audit Committee	√	√	√	√

Tabel Independensi Komite Audit
Audit Committee Independence

Aspek Independensi Independence Aspect	**Maximianus Puguh Djiwanto**	**Rakhman Fuadhy Kurniawan**	**Ahmad Zakie Mubarrok**	**Sofia Chairunnisa**
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah Does not serve as administrators of political parties, officials and government	√	√	√	√

PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI KOMITE AUDIT PADA TAHUN 2025

TRAINING AND/OR COMPETENCY DEVELOPMENT OF AUDIT COMMITTEE IN 2025

Nama Name	**Jabatan** Position	**Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan** Type of Training and Competency Development/Training Material	**Waktu Pelaksanaan** Date	**Penyelenggara** Organizer
Maximianus Puguh Djiwanto	Ketua Chairman	Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada Bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris dalam Bab *Corporate Governance* Laporan Tahunan ini. Training and/or Competency Development can be seen in the Training and/or Competency Development Section of Board of Commissioners in the Corporate Governance Chapter of this Annual Report.		
Rakhman Fuadhy Kurniawan	Wakil Ketua Vice Chairman	Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada Bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris dalam Bab *Corporate Governance* Laporan Tahunan ini. Training and/or Competency Development can be seen in the Training and/or Competency Development Section of Board of Commissioners in the Corporate Governance Chapter of this Annual Report.		
Ahmad Zakie Mubarrok	Anggota Member	Review Course dan Ujian Sertifikasi Certified Internal Auditor (CIA) Certified Internal Auditor (CIA) Course Review and Certification Exam	4-20 Agustus 2025 August 4-20, 2025	The Institute of Internal Auditors (IIA)
		Workshop Digital Forensik Digital Forensics Workshop	25 September 2025 September 25, 2025	ACFE Indonesia Chapter
		Sertifikasi CAFG (Certified Anti Fraud Governance) CAFG (Certified Anti-Fraud Governance) Certification	Kamis-Jumat, 18-19 September 2025, Thursday-Friday, September 18-19, 2025	PT GRC Management
Sofia Chairunnisa	Anggota Member	Munas FKSPI	2-4 Juli 2025 July 2-4, 2025	KAI
		Pelatihan Over Financial Reporting (ICOFR) dengan tema "Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR)" Over-Financial Reporting (ICOFR) Training with the theme “Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR)”	26 Agustus 2025 August 26, 2025	Pendidikan Profesional Berkelanjutan Ikatan Komite Audit Indonesia (PPL IKAI) Continuing Professional Education of the Indonesian Audit Committee Association (PPL IKAI)
		Sertifikasi CAFG (Certified Anti Fraud Governance) CAFG (Certified Anti-Fraud Governance) Certification	Kamis-Jumat, 18-19 September 2025, Thursday-Friday, September 18-19, 2025	PT GRC Management

RAPAT KOMITE AUDIT

KEBIJAKAN RAPAT KOMITE AUDIT

Komite Audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota Komite Audit yang paling senior, apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir. Jika dipandang perlu, Komite Audit dapat mengundang pihak Manajemen yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat Komite Audit. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir. Komite Audit mengadakan rapat koordinasi dengan SPI sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan.

AGENDA RAPAT KOMITE AUDIT

Sepanjang tahun 2025, tanggal pelaksanaan, Agenda rapat dan Peserta rapat Komite Audit, sebagai berikut.

AUDIT COMMITTEE MEETING

AUDIT COMMITTEE MEETING POLICY

Audit Committee holds meetings at least equal to the minimum Board of Commissioners meetings as stipulated in the Company's Articles of Association. Audit Committee meeting is chaired by the Chairman of Audit Committee or the most senior member of Audit Committee, if the Chairman of Audit Committee is unable to attend. If deemed necessary, Audit Committee may invite Management parties related to the meeting material to attend Audit Committee meeting. Each Audit Committee meeting is set forth in the minutes of meeting signed by all members of Audit Committee present. Audit Committee holds a coordination meeting with SPI at least once every 3 (three) months.

AUDIT COMMITTEE MEETING AGENDA

Throughout 2025, the Audit Committee's meeting dates, agendas, and participants are as follows.

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
1	14 Januari 2025 January 14, 2025	Pembahasan Tanggapan atas Usulan RKAP Tahun 2025 Discussion of Responses to the Proposed 2025 Work Plan and Budget (RKAP)	• Heru Sukanto • Rakhman Fuadhy • Ahmad Zakie Mubarrok • Sofia Chairunisa
2	6 Februari 2025 February 6, 2025	Pembahasan Tanggapan Temuan Pemeriksaan BPK Tahap I dan II Discussion of Responses to the Audit Board's Audit Findings Phases I and II	• Heru Sukanto • Rakhman Fuadhy • Ahmad Zakie Mubarrok • Sofia Chairunisa
3	14 Februari 2025 February 14, 2025	Pembahasan Persetujuan atas Usulan Penghapusbukuan Aset Tetap PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Tahun 2024 dengan Mekanisme Jual/Lelang Discussion of Approval of the Proposed Write-Off of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Fixed Assets in 2024 Using a Sale/Auction Mechanism	• Heru Sukanto • Rakhman Fuadhy • Ahmad Zakie Mubarrok • Sofia Chairunisa
4	17 Februari 2025 February 17, 2025	Pembahasan Rekomendasi atas Usulan Penghapusbukuan Aset Tetap PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Tahun 2024 dengan Mekanisme Jual/Lelang Discussion of Recommendations for the Proposed Write-Off of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Fixed Assets in 2024 Using a Sale/Auction Mechanism	• Heru Sukanto • Rakhman Fuadhy • Ahmad Zakie Mubarrok • Sofia Chairunisa
5	19 Maret 2025 March 19, 2025	Pembahasan Persetujuan Penghapusbukuan Piutang Bermasalah PUMK Kantor Pusat Tahun 2024 Discussion of Approval of the Write-Off of Non-Performing Receivables from the Head Office PUMK in 2024	• Heru Sukanto • Rakhman Fuadhy • Ahmad Zakie Mubarrok • Sofia Chairunisa
6	30 April 2025 April 30, 2025	Pembahasan Tanggapan atas Rencana Restrukturisasi PT Pelindo (Persero) melalui Pengambilalihan Saham PT Pelindo Marine Service pada PT Pelindo Energi Logistik oleh PT Pelindo Multi Terminal Discussion of Responses to the Restructuring Plan of PT Pelindo (Persero) Through the Acquisition of PT Pelindo Marine Service Shares in PT Pelindo Energi Logistik by PT Pelindo Multi Terminal	• Heru Sukanto • Rakhman Fuadhy • Ahmad Zakie Mubarrok • Sofia Chairunisa
7	5 Mei 2025 May 5, 2025	Pembahasan Penyampaian Kuesioner Evaluasi Kantor Akuntan Publik (KAP) Tahun Buku 2024 Discussion of Submission of Public Accounting Firm (KAP) Evaluation Questionnaire for the 2024 Fiscal Year	• Heru Sukanto • Rakhman Fuadhy • Ahmad Zakie Mubarrok • Sofia Chairunisa

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
8	22 Mei 2025 May 22, 2025	Pembahasan Tanggapan Tertulis atas Rencana Restrukturisasi PT Pelindo (Persero) Melalui Pengambilalihan Saham PT Pelindo Marine Service Pada PT Alur Pelayaran Barat Surabaya oleh PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia Discussion of Written Responses to the Restructuring Plan of PT Pelindo (Persero) Through the Acquisition of PT Pelindo Marine Service Shares in PT West Surabaya Shipping Channel by PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia	• Heru Sukanto • Rakhman Fuadhy • Ahmad Zakie Mubarrok • Sofia Chairunisa
9	26 Mei 2025 May 26, 2025	Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen Triwulan I Tahun 2025 PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Commissioners' Response to the First Quarter 2025 Management Report of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	• Heru Sukanto • Rakhman Fuadhy • Ahmad Zakie Mubarrok • Sofia Chairunisa
10	28 Mei 2025 May 28, 2025	Pembahasan Penyampaian Informasi Pelaksanaan Pekerjaan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tahun 2024 Discussion of the Submission of Information on the Implementation of Public Accounting Firm's Work in 2024	• Heru Sukanto • Rakhman Fuadhy • Ahmad Zakie Mubarrok • Sofia Chairunisa
11	2 Juni 2025 June 2, 2025	Pembahasan Tanggapan Dewan Komisaris atas Penyampaian Laporan Tahun 2024 (Audited) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Discussion of Board of Commissioners' Response to the Submission of 2024 Audited Report of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	• Heru Sukanto • Rakhman Fuadhy • Ahmad Zakie Mubarrok • Sofia Chairunisa
12	25 Juni 2025 June 25, 2025	Pembahasan Tanggapan atas Rencana Restrukturisasi PT Pelindo (Persero) melalui Pengambilalihan Saham PT Pelindo Marine Service pada PT Pelindo Energi Logistik oleh PT Pelindo Multi Terminal Discussion of the Response to the Restructuring Plan of PT Pelindo (Persero) through the Acquisition of PT Pelindo Marine Service's Shares in PT Pelindo Energi Logistik by PT Pelindo Multi Terminal	• Maximianus Puguh Djiwanto • Rakhman Fuadhy • Ahmad Zakie Mubarrok • Sofia Chairunisa
13	25 Juni 2025 June 25, 2025	Pembahasan Penyampaian Kuesioner Evaluasi Kantor Akuntan Publik (KAP) Tahun Buku 2024 Discussion of the Submission of Public Accounting Firm's Evaluation Questionnaire for Fiscal Year 2024	• Maximianus Puguh Djiwanto • Rakhman Fuadhy • Ahmad Zakie Mubarrok • Sofia Chairunisa
14	9 Juli 2025 July 9, 2025	Pembahasan Tanggapan Tertulis atas Rencana Restrukturisasi PT Pelindo (Persero) Melalui Pengambilalihan Saham PT Pelindo Marine Service Pada PT Alur Pelayaran Barat Surabaya oleh PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia Discussion of the Written Response to the Restructuring Plan of PT Pelindo (Persero) through the Acquisition of PT Pelindo Marine Service's Shares in PT Alur Pelayaran Barat Surabaya by PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia	• Maximianus Puguh Djiwanto • Rakhman Fuadhy • Ahmad Zakie Mubarrok • Sofia Chairunisa
15	29 Juli 2025 July 29, 2025	Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen Triwulan I Tahun 2025 PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Commissioners' Response to the First Quarter 2025 Management Report of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	• Maximianus Puguh Djiwanto • Rakhman Fuadhy • Ahmad Zakie Mubarrok • Sofia Chairunisa
16	12 Agustus 2025 August 12, 2025	Pembahasan Penyampaian Informasi Pelaksanaan Pekerjaan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tahun 2024 Discussion on the Submission of Information on the Implementation of Public Accounting Firm's Work in 2024	• Maximianus Puguh Djiwanto • Rakhman Fuadhy • Ahmad Zakie Mubarrok • Sofia Chairunisa
17	25 Agustus 2025 August 25, 2025	Pembahasan Tanggapan Dewan Komisaris atas Penyampaian Laporan Tahun 2024 (Audited) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Discussion on Board of Commissioners' Response to the Submission of 2024 Audited Report of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	• Maximianus Puguh Djiwanto • Rakhman Fuadhy • Ahmad Zakie Mubarrok • Sofia Chairunisa
18	29 September 2025 September 29, 2025	Pembahasan Tanggapan atas Rencana Restrukturisasi PT Pelindo (Persero) melalui Pengambilalihan Saham PT Pelindo Marine Service pada PT Pelindo Energi Logistik oleh PT Pelindo Multi Terminal Discussion on the Response to the Restructuring Plan of PT Pelindo (Persero) through the Acquisition of PT Pelindo Marine Service Shares in PT Pelindo Energi Logistik by PT Pelindo Multi Terminal	• Maximianus Puguh Djiwanto • Rakhman Fuadhy • Ahmad Zakie Mubarrok • Sofia Chairunisa

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
19	17 Oktober 2025 October 17, 2025	Pembahasan Usulan Penyesuaian Imbalan Jasa Audit Tahun 2025 Discussion on the Proposed Adjustment to 2025 Audit Fee	• Maximianus Puguh Djiwanto • Rakhman Fuadhy • Ahmad Zakie Mubarrok • Sofia Chairunisa
20	27 Oktober 2025 October 27, 2025	Pembahasan Penyesuaian Imbalan Jasa Audit Tahun 2025 Discussion on the Adjustment to 2025 Audit Fee	• Maximianus Puguh Djiwanto • Rakhman Fuadhy • Ahmad Zakie Mubarrok • Sofia Chairunisa
21	28 Oktober 2025 October 28, 2025	Pembahasan Persetujuan Dewan Komisaris atas Pendanaan Tahun 2025 PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Discussion on Board of Commissioners' Approval of the 2025 Funding of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	• Maximianus Puguh Djiwanto • Rakhman Fuadhy • Ahmad Zakie Mubarrok • Sofia Chairunisa
22	19 November 2025 November 19, 2025	Pembahasan Persetujuan Pembagian Dividen Interim dan Tanggapan Tertulis atas Pelepasan Saham pada PT Pertamina Bina Medika IHC kepada PT Danantara Asset Management (Persero) Discussion on the Approval of Interim Dividend Distribution and Written Response to the Disposal of Shares in PT Pertamina Bina Medika IHC to PT Danantara Asset Management (Persero)	• Maximianus Puguh Djiwanto • Rakhman Fuadhy • Ahmad Zakie Mubarrok • Sofia Chairunisa
23	20 November 2025 November 20, 2025	Pembahasan Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen Triwulan III Tahun 2025 PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Discussion on Board of Commissioners' Response to 2025 Quarterly Management Report of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	• Maximianus Puguh Djiwanto • Rakhman Fuadhy • Ahmad Zakie Mubarrok • Sofia Chairunisa
24	21 November 2025 November 21, 2025	Pembahasan Tanggapan Dewan Komisaris atas Tindak Lanjut Kajian Restrukturisasi PT Pelabuhan Indonesia Investama (PII) Discussion of Board of Commissioners' Response to the Follow-Up on the Restructuring Study of PT Pelabuhan Indonesia Investama (PII)	• Maximianus Puguh Djiwanto • Rakhman Fuadhy • Ahmad Zakie Mubarrok • Sofia Chairunisa
25	22 Desember 2025 December 22, 2025	Pembahasan Tanggapan atas Rencana Pengalihan Aset Alat Bongkar Muat dan Alat Apung serta Persetujuan atas Amandemen Kerjasama Operasi antara PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan Subholding Discussion of Responses to the Planned Transfer of Loading and Unloading Equipment and Floating Equipment Assets and Approval of the Amendment to Joint Operation Agreement between PT Pelabuhan Indonesia (Persero) and Subholding	• Maximianus Puguh Djiwanto • Rakhman Fuadhy • Ahmad Zakie Mubarrok • Sofia Chairunisa
26	22 Desember 2025 December 22, 2025	Pembahasan Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Tindak Lanjut Penyelesaian PMN Discussion of Board of Commissioners' Response to the PMN Settlement Follow-up Report	• Maximianus Puguh Djiwanto • Rakhman Fuadhy • Ahmad Zakie Mubarrok • Sofia Chairunisa
27	29 Desember 2025 December 29, 2025	Pembahasan Tanggapan Dewan Komisaris atas Usulan RKAP Tahun 2026 Discussion of Board of Commissioners' Response to the Proposed 2026 Work Plan and Budget (RKAP)	• Maximianus Puguh Djiwanto • Rakhman Fuadhy • Ahmad Zakie Mubarrok • Sofia Chairunisa

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT KOMITE AUDIT

AUDIT COMMITTEE MEETINGS FREQUENCY AND ATTENDANCE

Nama Name	**Jabatan** Position	**Rapat Komite Audit** Audit Committee Meeting		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran Number and Percentage of Attendance		
		Jumlah Rapat Number of Meetings	**Jumlah Kehadiran** Number of Attendance	**Persentase** Percentage
Maximianus Puguh Djiwanto	Ketua Chairman	16	16	100%
Rakhman Fuadhy Kurniawan	Wakil Ketua Vice Chairman	16	16	100%
Ahmad Zakie Mubarrok	Anggota Member	27	27	100%
Sofia Chairunnisa	Anggota Member	27	27	100%

PROGRAM KERJA DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE AUDIT TAHUN 2025

Beberapa kegiatan utama Komite Audit pada tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

1. Tanggapan atas Usulan RKAP Tahun 2025;
2. Tanggapan Temuan Pemeriksaan BPK Tahap I dan II;
3. Persetujuan atas Usulan Penghapusbukuan Aset Tetap PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Tahun 2024 dengan Mekanisme Jual/Lelang;
4. Rekomendasi atas Usulan Penghapusbukuan Aset Tetap PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Tahun 2024 dengan Mekanisme Jual/Lelang;
5. Persetujuan Penghapusbukuan Piutang Bermasalah PUMK Kantor Pusat Tahun 2024;
6. Tanggapan atas Rencana Restrukturisasi PT Pelindo (Persero) melalui Pengambilalihan Saham PT Pelindo Marine Service pada PT Pelindo Energi Logistik oleh PT Pelindo Multi Terminal;
7. Penyampaian Kuesioner Evaluasi Kantor Akuntan Publik (KAP) Tahun Buku 2024;
8. Tanggapan Tertulis atas Rencana Restrukturisasi PT Pelindo (Persero) Melalui Pengambilalihan Saham PT Pelindo Marine Service Pada PT Alur Pelayaran Barat Surabaya oleh PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia;
9. Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen Triwulan I Tahun 2025 PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
10. Penyampaian Informasi Pelaksanaan Pekerjaan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tahun 2024;
11. Tanggapan Dewan Komisaris atas Penyampaian Laporan Tahun 2024 (Audited) PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
12. Laporan Evaluasi Kantor Akuntan Publik Tahun Buku 2024;

WORK PROGRAM AND IMPLEMENTATION OF AUDIT COMMITTEE'S DUTIES IN 2025

Audit Committee's main activities in 2025 include the following:

1. Response to the Proposed 2025 Work Plan and Budget (RKAP);
2. Response to the Audit Board's Audit Findings from Phases I and II;
3. Approval of the Proposed Write-Off of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Fixed Assets in 2024 through a Sale/Auction Mechanism;
4. Recommendation on the Proposed Write-Off of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Fixed Assets in 2024 through a Sale/Auction Mechanism;
5. Approval of the Write-Off of Non-Performing Receivables from the Head Office PUMK in 2024;
6. Response to the Restructuring Plan for PT Pelindo (Persero) through the Acquisition of PT Pelindo Marine Service's Shares in PT Pelindo Energi Logistik by PT Pelindo Multi Terminal;
7. Submission of Public Accounting Firm (KAP) Evaluation Questionnaire for the 2024 Fiscal Year;
8. Written Response to the Restructuring Plan of PT Pelindo (Persero) Through the Acquisition of PT Pelindo Marine Service Shares in PT Alur Pelayaran Barat Surabaya by PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia;
9. Response from the Board of Commissioners to the First Quarter 2025 Management Report of PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
10. Submission of Information on the Implementation of Work of Public Accounting Firm (KAP) in 2024;
11. Response from the Board of Commissioners to the Submission of 2024 Audited Report of PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
12. Evaluation Report of Public Accounting Firm for the 2024 Fiscal Year;

13. Rekomendasi Kantor Akuntan Publik (KAP) Tahun Buku 2025;
14. Tanggapan Tertulis atas Rencana Restrukturisasi PT Pelindo (Persero) Melalui Pengambilalihan Saham Milik PT Pelindo Terminal Petikemas pada PT Berlian Jasa Terminal Indonesia oleh PT Pelindo Solusi Logistik;
15. Permohonan Tanggapan Tertulis/Rekomendasi atas Usulan Penghapusbukuan Aset Tetap Sebagian Tanah SHGB No.260/Cilincing seluas 289 m2 untuk Pembangunan SUTET 500 kV;
16. Pelaksanaan Proses Pengadaan Kantor Akuntan Publik (KAP) Laporan Keuangan Konsolidasian PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Tahun Buku 2025;
17. Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen Triwulan II Tahun 2025 PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
18. 18. Persetujuan Penghapusbukuan Piutang dan Tanggapan Penghapustagihan Piutang PT Pelabuhan Indonesia (Persero) kepada PT Portek Indonesia (dalam likuidasi);
19. Usulan Penyesuaian Imbalan Jasa Audit Tahun 2025;
20. Penyesuaian Imbalan Jasa Audit Tahun 2025;
21. Persetujuan Dewan Komisaris atas Pendanaan Tahun 2025 PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
22. Persetujuan Pembagian Dividen Interim dan Tanggapan Tertulis atas Pelepasan Saham pada PT Pertamina Bina Medika IHC kepada PT Danantara Asset Management (Persero);
23. Komisaris atas Laporan Manajemen Triwulan III Tahun 2025 PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
24. Tanggapan Dewan Komisaris atas Tindak Lanjut Kajian Restrukturisasi PT Pelabuhan Indonesia Investama (PII);
25. Tanggapan atas Rencana Pengalihan Aset Alat Bongkar Muat dan Alat Apung serta Persetujuan atas Amandemen Kerjasama Operasi antara PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan Subholding;
26. Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Tindak Lanjut Penyelesaian PMN;
27. Tanggapan Dewan Komisaris atas Usulan RKAP Tahun 2026.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Komite Nominasi dan Remunerasi adalah Komite yang ·dibentuk oleh Dewan Komisaris dengan maksud untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pemantauan, pengawasan dan penilaian atas kebijakan dan pelaksanaan nominasi dan remunerasi. Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk dengan tujuan untuk memberikan masukan kepada Dewan Komisaris bahwa Perusahaan telah melaksanakan proses nominasi dan remunerasi secara baik memadai.

13. Recommendation for Public Accounting Firm (KAP) for the 2025 Fiscal Year;
14. Written Response to the Restructuring Plan of PT Pelindo (Persero) Through the Acquisition of Shares Owned by PT Pelindo Terminal Petikemas in PT Berlian Jasa Terminal Indonesia by PT Pelindo Solusi Logistik;
15. Request for Written Response/Recommendation to the Proposed Write-Off of Fixed Assets of Part of Land Title No. 260/Cilincing, covering an area of 289 m2 for the Construction of a 500 kV High-voltage Transmission Line (SUTET);
16. Implementation of Public Accounting Firm (KAP) Procurement Process for the Consolidated Financial Statements of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) for the 2025 Fiscal Year;
17. Response from Board of Commissioners to the Management Report for the Second Quarter of 2025 of PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
18. Approval of the Write-Off of Receivables and Response to the Write-Off of Receivables from PT Pelabuhan Indonesia (Persero) to PT Portek Indonesia (in liquidation);
19. Proposed Adjustment to Audit Fees for 2025;
20. Adjustment to Audit Fees for 2025;
21. Approval of Board of Commissioners on the 2025 Funding of PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
22. Approval of the Distribution of Interim Dividends and Written Response to the Disposal of Shares in PT Pertamina Bina Medika IHC to PT Danantara Asset Management (Persero);
23. Board of Commissioners' Response to the Management Report for the Third Quarter of 2025 of PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
24. Response of Board of Commissioners on the Follow-up to the Restructuring Study of PT Pelabuhan Indonesia Investama (PII);
25. Response to the Planned Transfer of Loading and Unloading Equipment and Floating Equipment Assets and Approval of the Amendment to the Joint Operations Agreement between PT Pelabuhan Indonesia (Persero) and the Subholding;
26. Response of Board of Commissioners on the Follow-up Report on the Settlement of State Capital Investments;
27. Response of Board of Commissioners to the Proposed 2026 RKAP.

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Nomination and Remuneration Committee is a Committee formed by Board of Commissioners with the aim of assisting the Board in carrying out its obligations to monitor, supervise and assess policies and implementation of nomination and remuneration. Nomination and Remuneration Committee was formed in order to providing input to the Board of Commissioners that the Company has implemented the nomination and remuneration process properly and adequately.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Tugas Pokok

1. Melakukan *review* secara berkala atas Sistem Pengelolaan Talenta (*Talent Management System*) perusahaan serta *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaannya.
2. Melakukan evaluasi terhadap sistem dan prosedur Pengklasifikasian Talenta (*Talent Classification*) yang dilakukan oleh Direksi.
3. Melakukan validasi dan kalibrasi atas Talenta yang diusulkan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris (*Selected Talent*), untuk menghasilkan daftar Talenta yang akan dinominasikan oleh Dewan Komisaris kepada RUPS/Menteri (*Nominated Talent*).
4. Melakukan evaluasi terhadap Calon Wakil Perseroan yang akan diusulkan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris perusahaan anak, sebelum diajukan kepada RUPS/Menteri.
5. Melakukan evaluasi atas usulan *Key Performance Indicators* Individu anggota Direksi.
6. Menyiapkan usulan sistem evaluasi kinerja individu bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
7. Menyiapkan usulan program pengembangan bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
8. Melakukan evaluasi atas kebijakan remunerasi bagi pegawai yang membutuhkan persetujuan/tanggapan dari Dewan Komisaris.
9. Melakukan evaluasi atas usulan Direksi mengenai struktur organisasi perusahaan.
10. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan permintaan Dewan Komisaris.

Tanggung jawab

1. Komite Nominasi dan Remunerasi bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.
2. Komite Nominasi dan Remunerasi bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris.
3. Pertanggungjawaban Komite Nominasi dan Remunerasi kepada Dewan Komisaris disampaikan dalam laporan sebagai berikut:
   a. Laporan tahunan pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi;
   b. Laporan Triwulanan pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi;
   c. Laporan untuk setiap pelaksanaan tugas khusus Komite Nominasi dan Remunerasi.
4. Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab menjaga kerahasian dokumen, data dan informasi Perseroan.

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE DUTIES AND RESPONSIBILITES

Main Duties

1. Conduct periodic reviews of the Company's Talent Management System as well as monitor and evaluate its implementation.
2. Evaluate the system and procedures for Talent Classification carried out by Board of Directors.
3. Validate and calibrate the Talents proposed by Board of Directors to Board of Commissioners (Selected Talent), to generate a list of Talents to be nominated by Board of Commissioners to GMS/Minister (Nominated Talent).
4. Evaluate the prospective Company Representative which will be proposed as a member of Board of Directors or Board of Commissioners of subsidiary, before submission to the GMS/Minister.
5. Evaluate the propose individual Key Performance Indicators of Board of Directors.
6. Prepare proposals for the individual performance evaluation system of Board of Directors and/or Board of Commissioners members.
7. Prepare proposals for development programs for members of Board of Directors and/or Board of Commissioners.
8. Evaluate the remuneration policy for employees requiring approval/response from Board of Commissioners.
9. Evaluate proposals from Board of Directors regarding the Company's organizational structure.
10. Perform other tasks as requested by the Board of Commissioners.

Responsibilities

1. Nomination and Remuneration Committee carrying out its duties and reporting independently, and directly responsible to Board of Commissioners.
2. Nomination and Remuneration Committee works collectively in performing its duties to assist Board of Commissioners.
3. The accountability of Nomination and Remuneration Committee to Board of Commissioners is presented in the following report:
   a. Annual report of Nomination and Remuneration Committee's duties implementation;
   b. Quarterly report of Nomination and Remuneration Committee's duties implementation;
   c. Report of Nomination and Remuneration Committee special tasks.
4. Nomination and Remuneration Committee is responsible for maintaining the confidentiality of the Company's documents, data and information.

WEWENANG KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Nominasi dan Remunerasi berwenang:
1. Me*review*, memeriksa, melakukan analisa dan memberikan pendapat serta rekomendasi dalam batas ruang lingkup tugasnya.
2. Mencari dan mendapatkan informasi (akses yang tidak terbatas) yang relevan dari Sistem Informasi Manajemen (SIM), laporan-laporan, maupun dari setiap anggota Direksi, karyawan atau individu atau narasumber terkait.
3. Mengundang manajemen untuk hadir dalam rapat Komite.

PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Nominasi dan Remunerasi Pelindo mengacu pada Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang terakhir ditetapkan oleh Dewan Komisaris melalui Keputusan Dewan Komisaris No. 06/KEP-DK/PI /VII-2022 tanggal 19 Juli 2022 tentang Penetapan Piagam (*Charter*) Komite Audit, Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia. Dalam Piagam tersebut memuat ketentuan yang harus dipatuhi pembentukan dan pelaksanaan kegiatan Komite Audit agar dapat bekerja secara independen, objektif, mandiri, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Piagam tersebut ditata dalam susunan bagian sebagai berikut:
1. Landasan Hukum;
2. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota;
3. Tugas Pokok;
4. Kewenangan;
5. Persyaratan Keanggotaan;
6. Tanggung Jawab;
7. Rapat;
8. Laporan;
9. Akses Kerahasiaan Informasi;
10. Rencana Kerja dan Anggaran;
11. Penghasilan Anggota;
12. Pengembangan/Peningkatan kapasitas;
13. Penggunaan Tenaga Ahli
14. Penilaian Kinerja;
15. Hubungan Kelembagaan
16. Lain-lain

MASA JABATAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan merupakan Anggota Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE AUTHORITIES

In carrying out its duties, Nomination and Remuneration Committee is authorised to:
1. Review, examine, analyse and provide opinions and recommendations within the scope of its duties;
2. Seek and obtain relevant information (unlimited access) from the Management Information System (SIM), reports, as well as from each member of Board of Directors, employees or related individuals or sources;
3. Invite management to attend committee meetings.

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE CHARTER

In carrying out its duties and responsibilities, Nomination and Remuneration Committee refers to the Nomination and Remuneration Committee Charter last established through Board of Commissioners' Decree No. 06/KEP-DK/PI /VII 2022 dated July 19, 2022, regarding Establishment of Charter for Audit Committee, GCG and Risk Management Monitoring Committee, and Nomination and Remuneration Committee of the State-Owned Company PT Pelabuhan Indonesia. The Charter contains provisions that must be adhered to in the formation and implementation of Nomination and Remuneration Committee activities in order to work independently, objectively, independently, transparently and accountably. The Charter is organised in the following sections:
1. Legal Basis;
2. Appointment and Dismissal of Members;
3. Duties;
4. Authorities;
5. Membership Requirements;
6. Responsibilities;
7. Meetings;
8. Report;
9. Access to Confidential Information;
10. Work Plan and Budget;
11. Member's Income;
12. Development/Capacity Building;
13. Use of Experts
14. Performance Assessment;
15. Institutional Relationship;
16. Others;

TENURE OF NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Tenure of nomination and remuneration committee members who are not members of Board of Commissioners is maximum is 3 (three) years and can be extended once for another 2 (two) years, without prejudice to the right of Board of Commissioners to dismiss them at any time.

STRUKTUR, KEANGGOTAAN DAN KEAHLIAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

STRUCTURE, MEMBERSHIP AND EXPERTISE OF NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

PERIODE 1 JANUARI – ... 2025

Nama Name	**Jabatan** Position	**Keterangan** Description	**Keahlian** Expertise
Suntana	Ketua Chairman	Wakil Komisaris Utama Deputy President Commissioner	Ekonomi Manajemen Management Economics
Arief Poyuono	Wakil Ketua Vice Chairman	Komisaris Independen Independent Commissioner	Ekonomi, Ilmu Komunikasi Economics, Communication Studies
Mahbub Junaedi	Anggota Member	Pihak Independen Independent Party	Akuntansi, Hukum Accounting, Law
Agus Pambagio	Anggota Member	Pihak Independen Independent Party	Manajemen Management

PROFIL KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE PROFILE

Suntana

Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi/ Komisaris
Chairman of Nomination and Remuneration Committee/ Deputy President Commissioner

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.
The profile can be found in the Board of Commissioners Profile section of this Annual Report.

Periode dan Masa Jabatan | Period and Term of Office:
Periode dan Masa Jabatan Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan periode dan masa jabatan sebagai Dewan Komisaris.
The Nomination and Remuneration Committee's period and term of office correspond to the period and term of office of Board of Commissioners.

Andus Winarno

Wakil Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi/ Komisaris
Vice Chairman of Nomination and Remuneration Committee/ Independent Commissioner

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.
The profile can be found in the Board of Commissioners Profile section of this Annual Report.

Periode dan Masa Jabatan | Period and Term of Office:
Periode dan Masa Jabatan Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan periode dan masa jabatan sebagai Dewan Komisaris.
The Nomination and Remuneration Committee's period and term of office correspond to the period and term of office of Board of Commissioners.

Agus Pambagio

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi/ Pihak Independen
Member of Nomination and Remuneration Committee/ Independent Party

Warga Negara Indonesia
Indonesian

Bandung
Bandung

Semarang. 19 Agustus 1959/65 tahun
Semarang. August 19, 1959/66 years old as of December 2025

Periode Pertama : 15 Oktober 2021 - 31 Oktober 2024
Periode Kedua : 6 Mei 2024 – sekarang
First Term: October 15, 2021 – October 31, 2024
Second Term: May 6, 2024 – present

Riwayat Pendidikan Educational History	• S1 Teknologi Kimia Tekstil dari Institut Teknologi Tekstil Bandung (1984) • S2 Engineering Management dari School of Engineering & Applied Science The George Washington University, Washington, DC, USA (1990). • Bachelor's degree in Textile Chemical Technology from the Bandung Institute of Textile Technology (1984) • Master's degree in Engineering Management from the School of Engineering & Applied Science, The George Washington University, Washington, DC, USA (1990).
Sertifikasi Certifications	• Certified Professional Negotiator dari Paska Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara, 2008 • Certified Professional US Lobbyist, from American Lobby League, Washington, DC 2008 • Certified Mastering Lobbyist, from European Training Institute, Brussels, Belgium 2010 • Certified Public Service Policy Development, SNCF France 2013 • Certified in Audit Committee Practices from The Indonesian Institute of Audit Committee, Jakarta 2024 • Certified Professional Negotiator from the Postgraduate Program of Law, Tarumanegara University, 2008 • Certified Professional US Lobbyist, from the American Lobby League, Washington, DC, 2008 • Certified Mastering Lobbyist, from the European Training Institute, Brussels, Belgium, 2010 • Certified Public Service Policy Development, SNCF France, 2013 • Certified in Audit Committee Practices from the Indonesian Institute of Audit Committees, Jakarta, 2024 • CAFG (Certified Anti-Fraud Governance) Certification - 2025
Pengalaman Kerja Work Experience	• Anggota Tim Pakar Administrsi Kependudukan, Kementerian Dalam Negeri (2021 – sekarang) • Anggota Dewan Pengawas Penanganan Tailing PT Freeport Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2019 – sekarang) • Komite Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris PT Pelindo 3 (Persero) (2019 – 2021) • Anggota Dewan Pertimbangan Proper Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2019 – sekarang) • Anggota Team Ahli Siber Pungli, Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan RI (2017 -2018) • Member of the Population Administration Expert Team, Ministry of Home Affairs (2021 – present) • Member of the PT Freeport Indonesia Tailings Management Supervisory Board, Ministry of Environment and Forestry (2019 – present) • Nomination and Remuneration Committee of the Board of Commissioners of PT Pelindo 3 (Persero) (2019 – 2021) • Member of the National Proper Advisory Council, Ministry of Environment and Forestry Forestry (2019 – present) • Member of the Cyber Extortion Expert Team, Coordinating Ministry for Political and Security Affairs of the Republic of Indonesia (2017-2018)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	• Keputusan Dewan Komisaris Nomor 6/KEP-DK/PI/X-2021 tanggal 15 Oktober 2021 • Keputusan Dewan Komisaris Nomor 8/KEP-DK/PI/V-2024 tanggal 06 Mei 2024 • Board of Commissioners Decree Number 6/KEP-DK/PI/X-2021 dated October 15, 2021 • Board of Commissioners Decree Number 8/KEP-DK/PI/V-2024 dated May 6, 2024
Jabatan Rangkap Concurrent Positions	• Penasehat Senior, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Kebijakan (2015-sekarang) • Anggota Dewan Pengawas Penanganan Tailing PT Freeport Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2015-sekarang) • Anggota Dewan Pertimbangan Proper Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2015-sekarang) • Senior Advisor, Ministry of Environment and Forestry, Policy Division (2015-present) • Member of the PT Freeport Indonesia Tailings Management Supervisory Board, Ministry of Environment and Forestry (2015-present) • Member of the National Proper Advisory Council, Ministry of Environment and Forestry (2015-present)

Mahbub Junaedi

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi/ Pihak Independen
Member of Nomination and Remuneration Committee/ Independent Party

Warga Negara Indonesia
Indonesian

Bandung
Bandung

Jakarta, 30 Desember 1972/52 tahun
Jakarta, December 30, 1972/53 years old as of December 2025

Periode Pertama : 15 Oktober 2021 – 4 Mei 2024
Periode Kedua : 6 Mei 2024 – sekarang
First Term: October 15, 2021 – May 4, 2024
Second Term: May 6, 2024 – present

Riwayat Pendidikan Educational History	• S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1998) • DIV Jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) (2000) • S1 Jurusan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2011) • S2 Jurusan Hukum Perdagangan Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2012) • Bachelor's Degree in Accounting, Faculty of Economics, University of Indonesia (1998) • Diploma IV in Accounting, State College of Accountancy (STAN) (2000) • Bachelor's Degree in Business Law, Faculty of Law, University of Indonesia (2011) • Master's Degree in International Trade Law, Faculty of Law, University of Indonesia (2012)
Sertifikasi Certifications	• Advokat PERADI • CA (Chartered Accountant) • CACP (Certification in Audit Committee Practices) • CRP (Certified Risk Professional) • CGP (Certified Governance Professional) • CRGP (Certified Risk Governance Professional) • WMI (Wakil Manager Investasi) • Ahli Kepelabuhanan (Port Expert) • Ahli Kepabeanan (Customs Expert) • PERADI Advocate • Chartered Accountant (CA) • Certification in Audit Committee Practices (CACP) • Certified Risk Professional (CRP) • Certified Governance Professional (CGP) • Certified Risk Governance Professional (CRGP) • Investment Manager (WMI) • Port Expert (Port Expert) • Customs Expert (Customs Expert) • Certified Anti-Fraud Governance (CAFG) Certification – 2025
Pengalaman Kerja Work Experience	• Kementerian Keuangan RI (1994-2008) • Komite Antidumping Indonesia (KADI) dan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) (2003-2008) • JMTLawHouse – Konsultan Hukum (2008-2014) • Komite Audit BPJS Kesehatan (2014-2018) • Komite Audit dan Sekretaris Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (2018-2021) • Komite Audit PT Pelindo II (2021) • Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (1994-2008) • Indonesian Anti-Dumping Committee (KADI) and Indonesian Trade Safeguards Committee (KPPI) (2003-2008) • JMTLawHouse – Legal Consultant (2008-2014) • BPJS Kesehatan Audit Committee (2014-2018) • Audit Committee and Secretary of the Supervisory Board of the Hajj Financial Management Agency (2018-2021) • Audit Committee of PT Pelindo II (2021)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	• Keputusan Dewan Komisaris Nomor 4/KEP-DK/PI/X-2021 • Keputusan Dewan Komisaris Nomor 8/KEP-DK/PI/V-2024 tanggal 06 Mei 2024 • Board of Commissioners Decree Number 4/KEP-DK/PI/X-2021 • Board of Commissioners Decree Number 8/KEP-DK/PI/V-2024 dated May 6, 2024
Jabatan Rangkap Concurrent Positions	-

KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN KERJA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE EDUCATIONAL QUALIFICATIONS AND WORK EXPERIENCE

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi
Nomination and Remuneration Committee Educational Qualifications and Work Experience

Nama Name	**Jabatan** Position	**Pendidikan** Education	**Pengalaman Kerja** Work experience
Suntana	Ketua Chairman	Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (SESPIMTI) College of Staff and Higher Leadership (SESPIMTI)	Memiliki pengalaman kerja di Kepolisian Experience working in the police force
Arief Poyuono	Wakil Ketua Vice Chairman	• S1 bidang Ekonomi • S2 bidang Ilmu Hukum • Bachelor's Degree in Economics • Master's Degree in Communication Studies	Memiliki pengalaman kerja di Metro Kajang Berhad dan PT Argo Artha Surya Experience working at Metro Kajang Berhad and PT Argo Artha Surya
Agus Pambagio	Anggota	• S1 Teknologi Kimia Tekstil • S2 Engineering Management • Bachelor's Degree in Chemical and Textile Technology • Master's Degree in Engineering Management	Memiliki pengalaman kerja di bidang lingkungan Experience working in the environmental sector
Mahbub Junaedi	Anggota	• S1 Jurusan Akuntansi • DIV Jurusan Akuntansi) • S1 Jurusan Hukum Bisnis • S2 Jurusan Hukum Perdagangan Internasional • Bachelor's Degree in Accounting • Diploma IV in Accounting • Bachelor's Degree in Business Law • Master's Degree in International Trade Law	Memiliki pengalaman kerja di bidang akuntansi, audit, investigasi, hukum, dan kesekretariatan Experience working in accounting, auditing, investigation, law, and secretarial fields

INDEPENDENSI KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

INDEPENDENCE OF NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Tabel Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi
Independence of Nomination and Remuneration Committee

Aspek Independensi Independence Aspect	**Suntana**	**Arief Poyuono**	**Agus Pambagio**	**Mahbub Junaedi**
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Has finansial finansial relationship with Board of Commissioners and Board of Directors	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi Has no managerial relationship in the Company, subsidiary, or affiliated Company	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan Does not have share ownership relationship in the Company	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Does not have family relationship with Board of Commissioners, Board of Directors, and/or fellow members of Nomination and Remuneration Committee	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah Does not serve as administrator of political parties, official and government	√	√	√	√

PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM

Nama Name	**Jabatan** Position	**Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan** Kompetensi /Pelatihan Type of Training and Competency Development/Training Material	**Waktu** Pelaksanaan Date	**Penyelenggara** Organizer
Suntana	Ketua Chairman	Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada Bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris dalam Bab *Corporate Governance* Laporan Tahunan ini. Training and/or Competency Development can be seen in the Board of Commissioners Training and/or Competency Development Section in the Corporate Governance Chapter of this Annual Report.		
Arief Poyuono	Wakil Ketua Vice Chairman	Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada Bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris dalam Bab *Corporate Governance* Laporan Tahunan ini. Training and/or Competency Development can be seen in the Board of Commissioners Training and/or Competency Development Section in the Corporate Governance Chapter of this Annual Report.		
Agus Pambagio	Anggota Member	Munas FKSPI FKSPI National Conference	2-4 Juli 2025 July 2-4, 2025	KAI
		Pelatihan Over Financial Reporting (ICOFR) dengan tema "Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR)" Over-Financial Reporting (ICOFR) Training with the theme "Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR)"	26 Agustus 2025 August 26, 2025	Pendidikan Profesional Berkelanjutan Ikatan Komite Audit Indonesia (PPL IKAI) Continuing Professional Education of the Indonesian Audit Committee Association (PPL IKAI)
		Sertifikasi CAFG (Certified Anti Fraud Governance) CAFG (Certified Anti-Fraud Governance) Certification	Kamis-Jumat, 18-19 September 2025 Thursday-Friday, September 18-19, 2025	PT GRC Management
Mahbub Junaedi	Anggota Member	Munas FKSPI FKSPI National Conference	2-4 Juli 2025 July 2-4, 2025	KAI
		Sertifikasi CAFG (Certified Anti Fraud Governance) CAFG (Certified Anti-Fraud Governance) Certification	Kamis-Jumat, 18-19 September 2025 Thursday-Friday, September 18-19, 2025	PT GRC Management

RAPAT KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE MEETING

KEBIJAKAN RAPAT KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Komite Nominasi dan Remunerasi mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dipimpin oleh Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi atau anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang paling senior, apabila Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi berhalangan hadir. Jika dipandang perlu, Komite Nominasi dan Remunerasi dapat mengundang pihak Manajemen yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat Komite Nominasi dan Remunerasi. Setiap rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang hadir. Komite Nominasi dan Remunerasi mengadakan rapat koordinasi dengan Struktural SDM sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan.

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE MEETING POLICY

Nomination and Remuneration Committee holds meetings at least equal to the minimum Board of Commissioners meetings as stipulated in the Company's Articles of Association. Nomination and Remuneration Committee meetings are chaired by the Chairman of Nomination and Remuneration Committee or the most senior member, if the Chairman of Nomination and Remuneration Committee is unable to attend. If deemed necessary, Nomination and Remuneration Committee may invite Management parties related to the meeting material to attend the Nomination and Remuneration Committee meeting. Each meeting of Nomination and Remuneration Committee is set out in the minutes of meeting signed by all members of Nomination and Remuneration Committee present. Nomination and Remuneration Committee holds a coordination meeting with Structural HC at least once every 3 (three) months.

AGENDA RAPAT KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE MEETING

Tabel Agenda Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi
Nomination and Remuneration Committee Meeting Agenda

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Keterangan Remarks
1.	28 Februari 2025 February 28, 2025	Pembahasan Pengisian Jabatan Direktur SDM dan Umum Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia Discussion on Filling the Position of Human Resources and General Affairs Director at PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	• Suntana • Arief Poyuono • Agus Pambagio • Mahbub Junaedi	Nominasi Nomination
2.	10 Maret 2025 March 10, 2025	Pembahasan Penyampaian Nominated Talent PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Tahun 2025 Discussion on Submission of Nominated Talent at PT Pelabuhan Indonesia (Persero) for 2025	• Suntana • Arief Poyuono • Agus Pambagio • Mahbub Junaedi	Nominasi Nomination
3.	26 Maret 2025 March 26, 2025	Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Rapat Pembahasan Nominated Talent Klaster Logistik Laut Tahun 2025 Discussion on Follow-up to Meeting Results on Nominated Talent for the Marine Logistics Cluster for 2025	• Suntana • Arief Poyuono • Agus Pambagio • Mahbub Junaedi	Nominasi Nomination
4.	26 Maret 2025 March 26, 2025	Pembahasan Penyampaian Nominated Talent Klaster Logistik Laut Tahun 2025 Discussion on Submission of Nominated Talent for the Marine Logistics Cluster for 2025	• Suntana • Arief Poyuono • Agus Pambagio • Mahbub Junaedi	Nominasi Nomination
5.	16 April 2025 April 16, 2025	Pembahasan Permohonan Persetujuan Pengangkatan Sekretaris Perusahaan Discussion on Request for Approval for Appointment of Corporate Secretary	• Suntana • Arief Poyuono • Agus Pambagio • Mahbub Junaedi	Nominasi Nomination
6.	29 April 2025 April 29, 2025	Pembahasan Penyampaian Usulan Penetapan Perhitungan Tantiem Tahun 2024 dan Gaji/Honorarium Tahun 2025 bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Discussion on Submission of Proposal for Determination of Calculation of 2024 Bonus and Salary/Honorarium for Members of Board of Directors and Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	• Suntana • Arief Poyuono • Agus Pambagio • Mahbub Junaedi	Remunerasi Nomination
7.	8 Mei 2025 May 8, 2025	Pembahasan Tanggapan Tertulis atas Rencana Pengusulan Wakil Perseroan sebagai Direksi dan Dewan Komisaris pada Anak Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Discussion on Written Responses to the Plan to Propose Representatives of the Company as Directors and Board of Commissioners at Subsidiaries of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	• Suntana • Arief Poyuono • Agus Pambagio • Mahbub Junaedi	Nominasi Remuneration
8.	26 Mei 2025 May 26, 2025	Pembahasan Fasilitas Kendaraan Dinas Bagi Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama Discussion on Official Vehicle Facilities for President Director and Deputy President Director	• Suntana • Arief Poyuono • Agus Pambagio • Mahbub Junaedi	Remunerasi Nomination
9.	12 Juni 2025 June 12, 2025	Pembahasan Pengisian Jabatan Direktur SDM dan Umum Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia Discussion on Filling the Position of Human Resources and General Affairs Director at PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	• Suntana • Arief Poyuono • Agus Pambagio • Mahbub Junaedi	Nominasi Remuneration

Tabel Agenda Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi
Nomination and Remuneration Committee Meeting Agenda

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants	Keterangan Remarks
10.	24 Juni 2025 June 24, 2025	Pembahasan Tanggapan Tertulis atas Permohonan Persetujuan Pencairan Tantiem yang Ditangguhkan Tahun Buku 2023 Tahun Pertama Discussion on Written Responses Regarding the Request for Approval of Deferred Bonus Disbursement for the First Year of Fiscal Year 2023	• Suntana • Arief Poyuono • Agus Pambagio • Mahbub Junaedi	Remunerasi Nomination
11.	8 Juli 2025 July 8, 2025	Pembahasan Pengisian Jabatan Direktur Keuangan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia Discussion on Filling the Position of Finance Director of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	• Suntana • Arief Poyuono • Agus Pambagio • Mahbub Junaedi	Nominasi Remuneration
12.	25 Agustus 2025 August 25, 2025	Penyesuaian Jabatan Direktur Keuangan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia Adjustment of the Position of Finance Director of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	• Suntana • Arief Poyuono • Agus Pambagio • Mahbub Junaedi	Nominasi Nomination
13.	11 September 2025 September 11, 2025	Pembahasan Tanggapan Tertulis atas Rencana Pengusulan Wakil Perseroan sebagai Direksi pada Anak Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Discussion on Written Response to the Plan to Propose a Company Representative as a Director at a Subsidiary of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	• Suntana • Arief Poyuono • Agus Pambagio • Mahbub Junaedi	Nominasi Nomination
14.	29 September 2025 September 29, 2025	Pembahasan Pemberhentian Sementara Direktur Pengembangan Usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia Discussion on the Temporary Dismissal of Director of Business Development of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	• Suntana • Arief Poyuono • Agus Pambagio • Mahbub Junaedi	Nominasi Nomination
15.	29 September 2025 September 29, 2025	Pembahasan Pelaksana Tugas Jabatan Direktur Pengembangan Usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia Discussion on the Acting Position of Director of Business Development of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	• Suntana • Arief Poyuono • Agus Pambagio • Mahbub Junaedi	Nominasi Nomination
16.	2 Oktober 2025 October 2, 2025	Pembahasan Permohonan Persetujuan Pengangkatan Group Head Satuan Pengawasan Intern Discussion on the Request for Approval of the Appointment of Group Head of Internal Audit Unit	• Suntana • Arief Poyuono • Agus Pambagio • Mahbub Junaedi	Nominasi Nomination
17.	2 Oktober 2025 October 2, 2025	Pembahasan Persetujuan Struktur Organisasi Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia (Persero Discussion on the Approval of Organizational Structure of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Head Office	• Suntana • Arief Poyuono • Agus Pambagio • Mahbub Junaedi	Nominasi Nomination
18.	3 Oktober 2025 October 3, 2025	Pembahasan Pembaruan Daftar Nominated Talent Klaster Logistik Laut Tahun 2025 Discussion on the Update of the List of Nominated Talents for the Marine Logistics Cluster in 2025	• Suntana • Arief Poyuono • Agus Pambagio • Mahbub Junaedi	Nominasi Nomination
19.	21 November 2025 November 21, 2025	Penyampaian Hasil Rapat Koordinasi Bidang SDM Semester II Tahun 2025 Submission of the Results of Human Capital Coordination Meeting for Semester II, 2025	• Suntana • Arief Poyuono • Agus Pambagio • Mahbub Junaedi	Nominasi Nomination

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

AUDIT COMMITTEE MEETINGS FREQUENCY AND ATTENDANCE

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi
Attendance Level of Nomination and Remuneration Committee Meetings

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Meeting		
		Jumlah dan Persentasi Kehadiran Number and Percentage of Attendance		
		Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Persentase Percentage
Suntana	Ketua Chairman	19	19	100%
Arief Poyuono	Wakil Ketua Vice Chairman	19	19	100%
Agus Pambagio	Anggota Member	19	19	100%
Mahbub Junaedi	Anggota Member	19	19	100%

PROGRAM KERJA DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI TAHUN 2025

WORK PROGRAM AND DUTIES IMPLEMENTATION OF NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE IN 2025

Beberapa kegiatan utama Komite Nominasi dan Remunerasi pada tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

1. Pengisian Jabatan Direktur SDM dan Umum Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia;
2. Penyampaian Nominated Talent PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Tahun 2025;
3. Tindak Lanjut Hasil Rapat Pembahasan Nominated Talent Klaster Logistik Laut Tahun 2025;
4. Penyampaian Nominated Talent Klaster Logistik Laut Tahun 2025;
5. Permohonan Persetujuan Pengangkatan Sekretaris Perusahaan;
6. Penyampaian Usulan Penetapan Perhitungan Tantiem Tahun 2024 dan Gaji/Honorarium Tahun 2025 bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
7. Tanggapan Tertulis atas Rencana Pengusulan Wakil Perseroan sebagai Direksi dan Dewan Komisaris pada Anak Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
8. Fasilitas Kendaraan Dinas Bagi Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama;
9. Pengisian Jabatan Direktur SDM dan Umum Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia;
10. Tanggapan Tertulis atas Permohonan Persetujuan Pencairan Tantiem yang Ditangguhkan Tahun Buku 2023 Tahun Pertama.
11. Pengisian Jabatan Direktur Keuangan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia;
12. Penyesuaian Jabatan Direktur Keuangan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia;

Several main activities of the Nomination and Remuneration Committee in 2025 include the following:

1. Filling the position of Human Resources and General Affairs Director of PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
2. Submission of Nominated Talent for PT Pelabuhan Indonesia (Persero) in 2025;
3. Follow-up on the results of the 2025 Marine Logistics Cluster Nominated Talent Discussion Meeting;
4. Submission of Nominated Talent for the Marine Logistics Cluster in 2025;
5. Request for Approval for the Appointment of Corporate Secretary;
6. Submission of the Proposal for Determining the Calculation of 2024 Bonus and 2025 Salary/Honorarium for Members of Board of Directors and Members of Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
7. Written Response to the Plan to Propose a Company Representative as a Director and Board of Commissioners at a Subsidiary of PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
8. Official Vehicle Facilities for President Director and Deputy President Director;
9. Filling the Position of Human Resources and General Affairs Director at PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
10. Written Response to the Request for Approval of the Deferred Disbursement of Bonuses for the First Year of 2023.
11. Filling the Position of Director of Finance at PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
12. Adjustment of the Position of Director of Finance at PT Pelabuhan Indonesia (Persero);

13. Tanggapan Tertulis atas Rencana Pengusulan Wakil Perseroan sebagai Direksi pada Anak Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
14. Pemberhentian Sementara Direktur Pengembangan Usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia;
15. Pelaksana Tugas Jabatan Direktur Pengembangan Usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia;
16. Permohonan Persetujuan Pengangkatan *Group Head* Satuan Pengawasan Intern;
17. Persetujuan Struktur Organisasi Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
18. Pembaruan Daftar Nominated Talent Klaster Logistik Laut Tahun 2025;
19. Penyampaian Hasil Rapat Koordinasi Bidang SDM Semester II Tahun 2025.

KEBIJAKAN SUKSESI DIREKSI

Pada tahun 2023 telah diterbitkan Peraturan Direksi tentang Manajemen Talenta dan Suksesi (Ref. Peraturan Direksi Nomor: HK.01/27/6/1/RKTK/UTMA /PLND-23 tanggal 27 Juni 2023). Peraturan Direksi ini mengatur tentang pengelolaan talenta Perseroan di Kantor Pusat, Regional, maupun Grup Bisnis mulai dari proses penjaringan, penilaian, pengembangan, perputaran, hingga hak dan kewajiban talenta Perseroan. Selain itu, Peraturan Direksi ini juga mengatur tentang mekanisme suksesi baik itu yang didapatkan dari hasil talent pool Perseroan, proses lelang jabatan, maupun pengisian dari sumber eksternal.

Direksi melalui Komite Talenta (Ref. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) HK.01/1/11/1/PSOG/UTMA /PLND-21 tanggal 01 November 2021 tentang Pedoman Komite Talenta di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero)) melakukan proses penjaringan dan penilaian atas calon yang dianggap memenuhi kriteria atau kualifikasi untuk diajukan atau diangkat menjadi Direksi dan Dewan Komisaris. Selanjutnya Direksi menyampaikan daftar Selected Talent yang direkomendasikan tersebut kepada Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan validasi dan kalibrasi atas calon-calon yang diusulkan oleh Direksi (*Selected Talent*) untuk memastikan apakah para talent tersebut dapat diajukan atau diangkat menjadi Direksi dan Dewan Komisaris (*Nominated Talent*). Dewan Komisaris selanjutnya menyampaikan usulan Nominated Talent kepada Pemegang Saham.

13. Written Response to the Plan to Propose a Company Representative as a Director at a Subsidiary of PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
14. Temporary Dismissal of the Director of Business Development at PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
15. Acting Director of Business Development at PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
16. Request for Approval for the Appointment of Group Head of Internal Audit Unit;
17. Approval of Organizational Structure of the Head Office of PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
18. Update of the List of Nominated Talents for the Marine Logistics Cluster in 2025;
19. Submission of the Results of Human Capital Coordination Meeting for Semester II of 2025.

BOARD OF DIRECTORS' SUCCESSION POLICY

In 2023, a Board of Directors Regulation concerning Talent Management and Succession was issued (Ref. Board of Directors Regulation Number: HK.01/27/6/1/RKTK/UTMA/PLND-23 dated June 27, 2023). This Board of Directors Regulation governs the management of the Company's talent at the Head Office, Regional Offices, and Business Groups, from the recruitment process, assessment, development, rotation, to the rights and obligations of the Company's talent. Furthermore, this Board of Directors Regulation also regulates the succession mechanism, whether obtained from the Company's talent pool, the job tender process, or from external sources.

Board of Directors, through the Talent Committee (Ref. Regulation of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) HK.01/1/11/1/PSOG/UTMA/PLND-21 dated November 1, 2021, concerning Guidelines for the Talent Committee within PT Pelabuhan Indonesia (Persero)), conducts a selection and assessment process for candidates deemed to meet the criteria or qualifications for nomination or appointment to Board of Directors and Board of Commissioners. Board of Directors then submits a list of recommended Selected Talent to the Board of Commissioners.

Board of Commissioners, through the Nomination and Remuneration Committee, validates and calibrates the candidates proposed by Board of Directors (Selected Talent) to determine whether they are suitable for nomination or appointment to Board of Directors and Board of Commissioners (Nominated Talent). Board of Commissioners then submits the proposed Nominated Talent to Shareholders.

KOMITE GCG DAN PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

Komite GCG & PMR adalah Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dengan maksud untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pemantauan, pengawasan dan penilaian atas kebijakan dan pelaksanaan Pemantau Manajemen Risiko. Komite GCG & PMR dibentuk dengan tujuan untuk memberikan masukan kepada Dewan Komisaris bahwa Perusahaan telah melaksanakan proses Risiko secara baik memadai

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE GCG DAN PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

Tugas-tugas Komite GCG & PMR adalah sebagai berikut:

1. Komite GCG & PMR membantu pengawasan Dewan Komisaris terhadap aspek sbb:
   a. Kebijakan manajemen risiko termasuk evaluasi terhadap proses penerapan manajemen risiko perusahaan.
   b. Pengawasan dan memantau terhadap kepatuhan Direksi dalam menjalankan Peraturan perundangan yang berlaku termasuk perjanjian dengan pihak ke tiga.
   c. Kebijakan dalam memberikan persetujuan atas transaksi atau tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris.
   d. Potensi terhadap benturan kepentingan.
   e. Pemantauan penerapan prinsip-prinsip tata Kelola perusahaan yang baik
2. Komite GCG & PMR bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris.
3. Komite GCG & PMR bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam laporan dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
4. Komite GCG & PMR memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem Manajemen Risiko serta pelaksanaannya.
5. Komite GCG & PMR memastikan telah terdapat prosedur reviu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan.
6. Komite GCG & PMR melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris.
7. Tugas khusus dari Dewan Komisaris:
   a. Pemberian tugas khusus kepada Komite GCG & PMR oleh Dewan Komisaris dilakukan dengan perintah tertulis yang memuat:
      - Nama yang diberi tugas;
      - Sifat penugasan;
      - Lingkup pekerjaan;
      - Tujuan dan sasaran pekerjaan;
      - Jangka waktu penugasan.
   b. Lingkup pekerjaan tugas khusus bagi Komite GCG & PMR sepenuhnya ditentukan oleh Dewan Komisaris sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

GCG AND RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE

GCG & Risk Management Monitoring (GCG & RMM) Committee is a committee formed by Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) with the aim of assisting the Board in carrying out their obligations to monitor, supervise and assess the policies and implementation of Risk Management. GCG & RMM Committee is formed to provide input to Board of Commissioners that the Company has carried out the Risk process properly and adequately.

GCG AND RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE DUTIES AND RESPONSIBILITIES

The duties of GCG & RMM Committee are as follows:

1. GCG & RMM Committee assists Board of Commissioners in overseeing the following aspects:
   a. Risk management policies, including evaluating the Company's risk management implementation process.
   b. Monitoring and ensuring Board of Directors compliance with applicable laws and regulations, including agreements with third parties.
   c. Approval Policies on transactions or actions within the Board of Commissioners' authority.
   d. Potential conflicts of interest.
   e. Monitoring the implementation of good corporate governance principles.
2. GCG & RMM Committee works collectively in carrying out their duties to assist Board of Commissioners.
3. GCG & RMM Committee is independent both in carrying out its duties and in reports and is responsible to Board of Commissioners.
4. GCG & RMM Committee provides recommendations regarding the improvement of Risk Management system and its implementation
5. GCG & RMM Committee ensures that there is a satisfactory review procedure for all information issued by the Company.
6. GCG & RMM Committee identifies matters that require Board of Commissioners' attention as well as other tasks assigned by Board of Commissioners.
7. Special Duties from Board of Commissioners:
   a. Board of Commissioners assigns special tasks to GCG & RMM Committee with a written order containing:
      - The name of assignee;
      - The nature of assignment;
      - Scope of work;
      - The goals and objectives of the work;
      - The duration of assignment
   b. The scope of work for special duties for GCG & RMM Committee is fully determined by Board of Commissioners as long as it does not conflict with applicable laws and regulations.

c. Dalam melaksanakan tugas khusus Komite GCG & PMR dapat:
   - Melakukan *review* terhadap semua catatan, dokumen dan informasi lainnya yang diperlukan termasuk notulen rapat Dewan Direksi dan rapat Dewan Komisaris jika dianggap perlu.
   - Melakukan analisis dan evaluasi, bekerjasama dengan Struktural Manajemen Risiko, dan atau Strutural unit kerja terkait atau meminta bantuan tenaga ahli atau konsultan untuk membantu Komite GCG & PMR dengan beban Perseroan.

d. Komite GCG & PMR menyampaikan laporan pelaksanaan tugas khusus kepada Dewan Komisaris.

Tanggung jawab Komite GCG & PMR adalah sebagai berikut:
1. Komite GCG & PMR bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
2. Komite GCG & PMR bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris.
3. Pertanggungjawaban Komite GCG & PMR kepada Dewan Komisaris disampaikan dalam laporan sebagai berikut:
   a. Laporan tahunan pelaksanaan tugas Komite GCG & PMR.
   b. Laporan Triwulanan pelaksanaan tugas Komite GCG & PMR.
   c. Laporan untuk setiap pelaksanaan tugas khusus Komite GCG & PMR.
4. Komite GCG & PMR bertanggungjawab menjaga kerahasian dokumen, data dan informasi Perseroan.

WEWENANG KOMITE GCG DAN PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

Dalam melaksanakan tugasnya Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko berwenang:
1. Mengakses catatan atau informasi tentang aset dan sumber daya lainnya dan memasuki pekarangan, Gedung, serta kantor yang dipergunakan oleh Perseroan;
2. Berhak mendapat dan meminta setiap hasil kajian risiko yang dilakukan baik oleh para *risk owner*, para pejabat struktural terkait, *risk champion*, Satuan Pengawasan Intern maupun Direksi Perseroan;
3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;
4. Dalam melaksanakan kewenangannya, Komite bekerja sama dengan unit kerja terkait, dalam hal ini para *risk owner*, pejabat struktural terkait kendali mutu dan manajemen risiko serta Satuan Pengawasan Internal Perseroan.

c. In carrying out the special duties, GCG & RMM Committee may:
   - Reviewing all necessary records, documents and other information including the minutes of Board of Directors meeting and Board of Commissioners meeting; if deemed necessary.
   - Conduct analysis and evaluation, cooperate with Structural Risk Management, and/or Structural related work units or request assistance from experts or consultants to assist GCG & RMM Committee at the expense of the Company.

d. GCG & RMM Committee submits a report on the implementation of special tasks to Board of Commissioners

The responsibilities of GCG & RMM Committee are as follows:
1. GCG & RMM Committee is responsible the Board of Commissioners.
2. GCG & RMM Committee works collectively in carrying out their duties to assist Board of Commissioners.
3. The accountability of GCG & RMM Committee to Board of Commissioners is presented in the following report:
   a. Annual report on the implementation of GCG & RMM Committee duties.
   b. Quarterly Report on the implementation of GCG & RMM Committee duties.
   c. Reports for each implementation of special duties of GCG & RMM Committee.
4. GCG & RMM Committee is responsible for maintaining the confidentiality of Company documents, data and information.

GCG AND RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE AUTHORITIES

In carrying out its duties, GCG and Risk Management Monitoring Committee is authorized to:
1. Access records or information about assets and other resources and enter the grounds, buildings, and offices used by the Company;
2. Have the right to obtain and request any results of risk assessments conducted either by risk owners, relevant structural officials, risk champions, Internal Audit Unit or Board of Directors of the Company;
3. Request explanations from Board of Directors and/or other officials regarding all issues relating to the management of the Company;
4. In exercising its authority, the Committee cooperates with relevant work units, in this case the risk owners, structural officials related to quality control and risk management as well as the Company's Internal Audit Unit.

PIAGAM KOMITE GCG DAN PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko Pelindo mengacu pada Piagam Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko terakhir ditetapkan oleh Dewan Komisaris melalui Keputusan Dewan Komisaris No. 06/KEP-DK/PI/VII-2022 tanggal 19 Juli 2022 tentang Penetapan Piagam (Charter) Komite Audit, Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko, dan Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia. Dalam Piagam tersebut memuat ketentuan yang harus dipatuhi pembentukan dan pelaksanaan kegiatan Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko agar dapat bekerja secara independen, objektif, mandiri, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Piagam tersebut ditata dalam susunan bagian sebagai berikut:

1. Landasan Hukum;
2. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota;
3. Tugas;
4. Kewenangan;
5. Persyaratan Keanggotaan;
6. Tanggung Jawab;
7. Rapat;
8. Laporan;
9. Akses Kerahasiaan Informasi;
10. Rencana Kerja dan Anggaran;
11. Penghasilan Anggota;
12. Pengembangan Profesional Lanjutan;
13. Penggunaan Tenaga Ahli
14. Penilaian Kinerja;
15. Hubungan Kelembagaan;
16. Lain-lain;
17. Penutup.

GCG AND RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE CHARTER

In carrying out its duties and responsibilities, Pelindo's GCG and Risk Management Monitoring Committee refers to the latest Audit Committee Charter established by the Board of Commissioners through the Decree of Board of Commissioners No. 06/KEP-DK/PI/VII-2022 dated July 19, 2022 concerning Determination of the Charter of Audit Committee, GCG and Risk Management Monitoring Committee and Nomination and Remuneration Committee of the Company (Persero) PT Pelabuhan Indonesia. The Charter contains provisions that must be adhered to in the formation and implementation of GCG and Risk Management Monitoring Committee activities in order to work independently, objectively, independently, transparently and accountably. The charter is organised in the following sections:

1. Legal Basis;
2. Appointment and Dismissal of Members;
3. Duties;
4. Authorities;
5. Membership Requirements;
6. Responsibilities;
7. Meetings;
8. Report;
9. Access to Confidential Information;
10. Work Plan and Budget;
11. Member's Income;
12. Development/Capacity Building;
13. Use of Experts
14. Performance Assessment;
15. Institutional Relationship;
16. Others;
17. Closing.

STRUKTUR, KEANGGOTAAN DAN KEAHLIAN KOMITE GCG DAN PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

STRUCTURE, MEMBERSHIP AND EXPERTISE OF GCG AND RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE

Nama Name	**Jabatan** Position	**Keterangan** Remarks	**Keahlian** Expertise
Jodi Mahardi	Ketua Chairman	Komisaris Commissioner	Manajemen Hubungan Internasional Management International Relations
Elwi Danil	Wakil Ketua Vice Chairman	Komisaris Commissioner	
Sugiyono	Anggota Member	Pihak Independen Independent Party	Akuntansi, Manajemen Accounting, Management
Budi Setiawan	Anggota Member	Pihak Independen Independent Party	Manajemen Risiko Risk Management

PROFIL KOMITE GCG DAN PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

Profil Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

GCG AND RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE PROFILE

The profile of GCG and Risk Management Monitoring Committee as of December 31, 2025 is as follows.

Jodi Mahardi

Ketua Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko/ Komisaris
Chairman of GCG and Risk Management Monitoring Committee/Commissioner

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.
The profile can be found in the Board of Commissioners Profile section of this Annual Report.

Periode dan Masa Jabatan | Period and Term of Office:
Periode dan Masa Jabatan Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko sesuai dengan periode dan masa jabatan sebagai Dewan Komisaris.The The period and term of office of GCG and Risk Management Monitoring Committee is in accordance with the period and term of office as Board of Commissioners.

Elwi DaniL

Anggota Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko/ Komisaris Independen
Member of GCG and Risk Management Monitoring Committee/Independent Commissioner

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.
The profile can be found in the Board of Commissioners Profile section of this Annual Report.

Periode dan Masa Jabatan | Period and Term of Office:
Periode dan Masa Jabatan Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko sesuai dengan periode dan masa jabatan sebagai Dewan Komisaris.
The period and term of office of GCG and Risk Management Monitoring Committee is in accordance with the period and term of office as Board of Commissioners.

Sugiyono

Anggota Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko/ Pihak Independen
Member of GCG and Risk Management Monitoring Committee/Independent Party

Warga Negara Indonesia
Indonesian

Jakarta
Jakarta

29 Mei 1985/usia 40 tahun per Desember 2025
May 29, 1985/age 40 years as of December 2025

Periode Pertama : 7 Maret 2022 – 6 Maret 2025
Periode Kedua : 7 Maret 2025 - 6 Maret 2027
First Period: March 7, 2022 – March 6, 2025
Second Period: March 7, 2025 – March 6, 2027

Tempat dan Tanggal Lahir/ Usia Place and Date of Birth/Age	29 Mei 1985/usia 40 tahun per Desember 2025 May 29, 1985/age 40 years as of December 2025
Riwayat Pendidikan Educational Background	• DIII Akuntansi Universitas Indonesia (2007) • Sarjana Akuntansi Universitas Indonesia (2009) • Magister Manajemen PPM School of Management (2022) • Diploma III in Accounting, University of Indonesia (2007) • Bachelor of Accounting, University of Indonesia (2009) • Master of Management, PPM School of Management (2022)
Sertifikasi Certification	*Certified Risk Governance Professional*
Pengalaman Kerja Work Experience	• *Sales Operation Audit Manager* PT Astra International,Tbk (2010 –2019) • *Risk* Management *Manager* PT Astra International,Tbk (Januari – Juli 2020) • *Risk Management Committee* PT Askrindo (2020 - sekarang) • Sales Operation Audit Manager PT Astra International,Tbk (2010 –2019) • Risk Management Manager PT Astra International,Tbk (Januari – Juli 2020) • Risk Management Committee PT Askrindo (2020 - sekarang)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	• Keputusan Dewan Komisaris No. 04/KEP-DK/PI/III-2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Good Corporate Governance dan Pemantau Manajemen Risiko Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia • Keputusan Dewan Komisaris No02/KEP-DK/PI/III-2025 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Komite Good Corporate Governance dan Pemantau Manajemen Risiko Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia • Board of Commissioners Decree No. 04/KEP-DK/PI/III-2022 concerning the Dismissal and Appointment of Members of Good Corporate Governance and Risk Management Monitoring Committee of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) • Board of Commissioners Decree No. 02/KEP-DK/PI/III-2025 concerning the Extension of Term of Office of Members of Good Corporate Governance and Risk Management Monitoring Committee of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
Jabatan Rangkap Concurrent Position	-

Budi Setiawan

Anggota Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko/ Pihak Independen
Member of GCG and Risk Management Monitoring Committee/Independent Party

Warga Negara Indonesia
Indonesian

Jakarta
Jakarta

Jakarta, 15 Oktober 1982/usia 43 tahun per Desember 2025
Jakarta, October 15, 1982/43 years old as of December 2025

Periode Pertama : 3 Januari 2024 sampai dengan 3 Januari 2027
First Period: January 3, 2024, to January 3, 2027

Riwayat Pendidikan Educational Background	• Diploma III Informatika Komputer – Politeknik LP3I Jakarta (2006) • Diploma III in Computer Informatics – LP3I Polytechnic Jakarta (2006) • Sarjana Komputer – STMIK MH Husni Thamrin (2008) • Bachelor of Computer Science – STMIK MH Husni Thamrin (2008) • Magister Manajemen Risiko – Universitas Indonesia (2014) • Master of Risk Management – University of Indonesia (2014)
Sertifikasi Certification	• Certification in Audit Committee Practices (CACP) – IKAI, 2024 • Business Continuity Management Certified Professional (BCMCP) – LSPMR, 2023 • Risk Management Level 1 Sektor Perbankan – LPPI, 2022 • *Risk Management Level 1 Banking Sector – LPPI, 2022* • Certified Risk Governance Professional (CRGP) – LSPMR, 2021 • Wakil Manajer Investasi (WMI) – OJK, 2020 • *Deputy Investment Manager (WMI) – OJK, 2020* • Risk Management Competemcy Assessor – BNSP, 2019 • Certified Financial Planner (CFP) – FPSB Indonesia, 2018 • Enterprise Risk Management Certified Professional (ERMCP) – ERMA, 2017 • Certified Risk Management Professional (CRMP) – LSPMR, 2017
Pengalaman Kerja Work Experience	• Senior Enterprise Risk Manager PT Visionet Internasional (2022 – 2024) • Head of Investment Division PT ASABRI (Persero) (2020 – 2022) • Head of Investment Strategy and Analysis Department PT ASABRI (Persero) (2018 – 2020) • Head of Risk Management Department PT ASABRI (Persero) (2015 – 2018) • Risk Management Supervisor PT ASABRI (Persero) (2012 – 2015) • Budget and Cost Control Supervisor PT ASABRI (Persero) (2010 – 2012) • Investment Staff PT ASABRI (Persero) (2004 – 2010)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia Nomor : 01/KEP-DK/PI/I-2024 tentang Pengangkatan Anggota Komite *Good Corporate Governance* dan Pemantau Manajemen Risiko Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia Decree of Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Number: 01/KEP-DK/PI/I-2024 concerning the Appointment of Members of Good Corporate Governance and Risk Management Monitoring Committee of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
Periode dan Masa Jabatan Period and Tenure	Periode Pertama : 3 Januari 2024 sampai dengan 3 Januari 2027 First Period: January 3, 2024, to January 3, 2027
Jabatan Rangkap Concurrent Position	.

MASA JABATAN KOMITE GCG DAN PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

GCG AND RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE TENURE

The tenure for members of GCG and Risk Management Monitoring Committee who are not members of Board of Commissioners is a maximum of 3 (three) years and can be extended once for another 2 (two) years, without prejudice to the right of Board of Commissioners to dismiss them at any time.

KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN KERJA KOMITE GCG DAN PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

GCG AND RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE EDUCATIONAL QUALIFICATIONS AND WORK EXPERIENCE

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko
GCG and Risk Management Monitoring Committee Educational Qualifications and Work Experience

Nama Name	**Jabatan** Position	**Pendidikan** Education	**Pengalaman Kerja** Work Experience
Jodi Mahardi	Ketua Chairman	• S1 bidang Manajemen • S2 bidang International Affairs • Bachelor of Management • Master of International Affairs	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan Has work experience in government sector
Elwi Danil	Wakil Ketua Vice Chairman	• S1 bidang Hukum • S2 bidang Hukum • S3 bidang Hukum • Bachelor of Law • Master of Law • Doctoral of Law	Memiliki pengalaman kerja di bidang Pendidikan Has work experience in education sector
Sugiyono	Anggota Member	• DIII Akuntansi • S1 Akuntansi • S2 Manajemen • Diploma III in Accounting • Bachelor in Accounting • Master of Management	Memiliki pengalaman kerja di bidang manajemen risiko Has work experience in risk management sector
Budi Setiawan	Anggota Member	• Diploma II Informatika Komputer • Sarjana Komputer • Magister Manajemen Risiko • Diploma II in Computer Informatics • Bachelor of Computer Science • Master of Risk Management	Memiliki pengalaman kerja di bidang manajemen risiko Has work experience in risk management sector

INDEPENDENSI KOMITE GCG DAN PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

GCG AND RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE INDEPENDENCE

Tabel Independensi Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko
GCG and Risk Management Monitoring Committee Independence

Aspek Independensi Independence Aspect	**Jodi Mahardi**	**Elwi Danil**	**Sugiyono**	**Budi Setiawan**
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi Has no managerial relationship in the Company, subsidiary, or affiliated Company	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan Does not have share ownership relationship in the Company	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko Does not have family relationship with Board of Commissioners, Board of Directors, and/or fellow members of Nomination and Remuneration Committee	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah Does not serve as administrator of political parties, official and government	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi Has no managerial relationship in the Company, subsidiary, or affiliated Company	√	√	√	√

PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI KOMITE GCG DAN PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO PADA TAHUN 2025

TRAINING AND/OR COMPETENCY DEVELOPMENT OF GCG AND RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE IN 2025

Nama Name	**Jabatan** Position	**Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan** Type of Training and Competency Development/Training Material	**Waktu dan Tempat Pelaksanaan** Date and Location	**Penyelenggara** Organizer
Jodi Mahardi	Ketua Chairman	Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada Bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris dalam Bab Corporate Governance Laporan Tahunan ini. Training and/or Competency Development can be seen in Board of Commissioners Training and/or Competency Development Section of the Corporate Governance Chapter of this Annual Report.		
Elwi Danil	Wakil Ketua Deputy Chairman	Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada Bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris dalam Bab Corporate Governance Laporan Tahunan ini. Training and/or Competency Development can be seen in Board of Commissioners Training and/or Competency Development Section of the Corporate Governance Chapter of this Annual Report.		
Sugiyono	Anggota Member	Pelatihan ICOFR ICOFR Training	18-19 Februari 2025 February 18-19, 2025	Pelindo Corpu (PT Pendidikan Maritim & Logistik Indonesia)
		Pelatihan MasterClass Program Series XXIV “Mitigasi Risiko Dalam Transformasi Digital” MasterClass Program Series XXIV Training "Risk Mitigation in Digital Transformation"	03 - 04 Juli 2025 July 3-4, 2025	PT. LSP Manajemen Risiko
		Pelatihan Over Financial Reporting (ICOFR) dengan tema "Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR)" Over Financial Reporting (ICOFR) Training with the theme "Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR)"	26 Agustus 2025 August 26, 2025	Pendidikan Profesional Berkelanjutan Ikatan Komite Audit Indonesia (PPL IKAI) Continuing Professional Education of the Indonesian Audit Committee Association (PPL IKAI)
		Sertifikasi CAFG (Certified Anti Fraud Governance) CAFG (Certified Anti-Fraud Governance) Certification	18-19 September 2025 September 18-19, 2025	PT GRC Management
		Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko XI XI National Conference on Risk Management Professionals	27-28 November 2025 November 27-28, 2025	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSPMR) Risk Management Professional Certification Institute (LSPMR)

Nama Name	Jabatan Position	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan Type of Training and Competency Development/Training Material	Waktu dan Tempat Pelaksanaan Date and Location	Penyelenggara Organizer
Budi Setiawan	Anggota Member	Pelatihan ICOFR ICOFR Training	18-19 Februari 2025 February 18-19, 2025	Pelindo Corpu (PT Pendidikan Maritim & Logistik Indonesia)
		Pelatihan MasterClass Program Series XXIV "Mitigasi Risiko Dalam Transformasi Digital" MasterClass Program Series XXIV Training "Risk Mitigation in Digital Transformation"	03 - 04 Juli 2025 July 3-4, 2025	PT. LSP Manajemen Risiko
		Pelatihan Over Financial Reporting (ICOFR) dengan tema "Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR)" Over Financial Reporting (ICOFR) Training with the theme "Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR)"	26 Agustus 2025 August 26, 2025	Pendidikan Profesional Berkelanjutan Ikatan Komite Audit Indonesia (PPL IKAI) Continuing Professional Education of the Indonesian Audit Committee Association (PPL IKAI)
		Sertifikasi CAFG (Certified Anti Fraud Governance) CAFG (Certified Anti-Fraud Governance) Certification	18-19 September 2025 September 18-19, 2025	PT GRC Management
		Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko XI XI National Conference on Risk Management Professionals	27-28 November 2025 November 27-28, 2025	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSPMR) Risk Management Professional Certification Institute (LSPMR)

RAPAT KOMITE GCG DAN PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

KEBIJAKAN RAPAT KOMITE GCG DAN PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Rapat Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko dipimpin oleh Ketua Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko atau anggota Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko yang paling senior, apabila Ketua GCG dan Komite Pemantau Manajemen Risiko berhalangan hadir. Jika dipandang perlu, Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko dapat mengundang pihak Manajemen yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko. Setiap rapat Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko yang hadir. Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko mengadakan rapat koordinasi dengan Struktural Manajemen Risiko sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan. Rapat diselenggarakan dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari separuh dari jumlah anggota.

GCG AND RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE MEETINGS

KEBIJAKAN RAPAT KOMITE GCG DAN PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

GCG and Risk Management Monitoring Committee conducts meetings at least equal to the minimum Board of Commissioners meetings as stipulated in the Company's Articles of Association. GCG and Risk Management Monitoring Committee meetings are chaired by the Chairman of GCG and Risk Management Monitoring Committee or the most senior member, if the Chairman of GCG and Risk Management Monitoring Committee is unable to attend. If deemed necessary, GCG and Risk Management Monitoring Committee may invite the Management related to the meeting material to attend GCG and Risk Management Monitoring Committee meeting. Each meeting of GCG and Risk Management Monitoring Committee is set forth in the minutes of meeting signed by all members of GCG and Risk Management Monitoring Committee present. GCG and Risk Management Monitoring Committee holds coordination meetings with Structural Risk Management at least once every 3 (three) months. A meeting can be held if attended by more than half of the members.

AGENDA RAPAT KOMITE GCG DAN PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

Sepanjang tahun 2025, tanggal pelaksanaan, agenda rapat dan peserta rapat Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko, sebagai berikut.

GCG AND RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE MEETING AGENDA

Throughout 2025, the meeting dates, agendas, and participants for GCG and Risk Management Monitoring Committee are as follows.

Tabel Agenda Rapat Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko
GCG and Risk Management Monitoring Committee Meeting Agenda

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
1	9 Januari 2025 January 9, 2025	Pembahasan Perencanaan Strategis BUMN Berbasis Risiko. Discussion on Risk-Based State-Owned Enterprise Strategic Planning.	• Jodi Mahardi • Elwi Danil • Sugiyono • Budi Setiawan
2	18 Februari 2025 February 18, 2025	Pembahasan analisis, evaluasi dan rencana strategis terkait scenario kemacetan di Pelabuhan Tanjung Priok. Discussion on analysis, evaluation, and strategic plans related to congestion scenarios at Tanjung Priok Port.	• Jodi Mahardi • Elwi Danil • Sugiyono • Budi Setiawan
3	20 Maret 2025 March 20, 2025	• Pembahasan terkait arahan dan hasil evaluasi dari KBUMN terhadap laporan risiko tahun 2024 dan 2025. • Pembahasan terkait Update PRIMA • Rencana Perlakuan Risiko terhadap diskusi pada rapat sebelumnya. • Discussion on the direction and evaluation results of KBUMN regarding the 2024 and 2025 risk reports. • Discussion on PRIMA Update. • Risk Treatment Plan based on discussions from the previous meeting.	• Jodi Mahardi • Elwi Danil • Sugiyono • Budi Setiawan
4	22 April 2025 April 22, 2025	• Pembahasan terkait Isu Kemacetan. • Pembahasan terkait update TW 1. • Discussion on Congestion Issues. • Discussion on the Q1 Update.	• Jodi Mahardi • Elwi Danil • Sugiyono • Budi Setiawan
5	23 Mei 2025 May 23, 2025	• Monitoring Profil Risiko Signifikan terkait Pendapatan dan Biaya. • Update Hasil Risk Maturity Assessment. • Monitoring of Significant Risk Profiles related to Revenue and Costs. • Update on Risk Maturity Assessment Results.	• Jodi Mahardi • Elwi Danil • Sugiyono • Budi Setiawan
6	23 Juni 2025 June 23, 2025	• Rapat koordinasi terkait Update profil risiko. • Pembahasan terkait struktur perusahaan serta Risiko Geopolitik. • Coordination meeting regarding Risk Profile Updates • Discussion on corporate structure and Geopolitical Risks	• Jodi Mahardi • Elwi Danil • Sugiyono • Budi Setiawan
7	22 Juli 2025 July 22, 2025	• Pembahasan terkiat Isu kemacetan dan Update TW1. • Pengkajian lebih dalam terkait BCP. • Pembahasan terkait PKR dan RMI. • Discussion on Congestion Issues and the Q1 Update. • In-depth review of BCP. • Discussion regarding PKR and RMI.	• Jodi Mahardi • Elwi Danil • Sugiyono • Budi Setiawan
8	22 Agustus 2025 August 22, 2025	• Pembahasan terkait Update Profil Risiko Signifikan 2025 – Juli 2025. • Update Draft Profil Risiko pada RKAP 2026. • Pembahasan terkait hal – hal strategis lainnya. • Discussion regarding the 2025 Significant Risk Profile Update – July 2025. • Update of the Draft Risk Profile in the 2026 RKAP. • Discussion regarding other strategic matters.	• Jodi Mahardi • Elwi Danil • Sugiyono • Budi Setiawan
9	24 September 2025 September 24, 2025	• Update Profil Risiko Signifikan 2025 sd Agustus 2025. • Pembahasan terkait aktivitas Kegiatan GCG. • Update Draft Kebijakan terkait insiden Manajemen & Krisis Manajemen. • Update of the Significant Risk Profile from 2025 to August 2025. • Discussion of GCG activities. • Update of the Draft Policy on Incident Management and Crisis Management.	• Jodi Mahardi • Elwi Danil • Sugiyono • Budi Setiawan

Tabel Agenda Rapat Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko
GCG and Risk Management Monitoring Committee Meeting Agenda

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
10	22 Oktober 2025 October 22, 2025	• Pembahasan terkait Update Hasil Progres Rukindo. • Update Profil Risiko TW 3 2025. • Pembahasan RKAP Aspek MR (Aspek Strategis Arahan Danantara). • Update Indikator Contogency Plan per Bulan September 2025. • Discussion regarding Rukindo Progress Update. • Risk Profile Update for Q3 2025. • Discussion of the RKAP (Regional Budget) Aspect of MR (Danantara's Strategic Direction Aspects). • Update of Contingency Plan Indicators as of September 2025.	• Jodi Mahardi • Elwi Danil • Sugiyono • Budi Setiawan
11	18 November 2025 November 18, 2025	Pembahasan terkait Profil Risiko RKAP 2026 Template Danantara. Discussion regarding the Risk Profile of the 2026 RKAP Danantara Template.	• Jodi Mahardi • Elwi Danil • Sugiyono • Budi Setiawan
12	15 Desembaer 2025 December 15, 2025	• Pembahasan terkait Update hasil diskusi Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko untuk mengevaluasi kebijakan BCM. • Monitoring terhadap Profil Risiko 2025 sampai dengan akhir 2025. • Discussion regarding the updated results of GCG Committee and Risk Management Monitoring Committee discussions to evaluate BCM policy. • Monitoring the 2025 Risk Profile until the end of 2025.	• Jodi Mahardi • Elwi Danil • Sugiyono • Budi Setiawan
13	9 Januari 2025 January 9, 2025	Pembahasan Perencanaan Strategis BUMN Berbasis Risiko. Discussion of Risk-Based State-Owned Enterprise Strategic Planning.	• Jodi Mahardi • Elwi Danil • Sugiyono • Budi Setiawan

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT KOMITE GCG DAN PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO

MEETING FREQUENCY AND ATTENDANCE OF GCG AND RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko
Attendance at GCG and Risk Management Monitoring Committee Meetings

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko GCG and Risk Management Monitoring Committee Meeting		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran Number and Percentage of Attendance		
		Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Percentage
Jodi Mahardi	Ketua Chairman	13	13	100%
Elwi Danil	Wakil Ketua Vice Chairman	13	13	100%
Sugiyono	Anggota Member	13	13	100%
Budi Setiawan	Anggota Member	13	13	100%

PROGRAM KERJA DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE GCG DAN PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2025

WORK PROGRAM AND DUTIES IMPLEMENTATION OF GCG AND RISK MANAGEMENT MONITORING COMMITTEE IN 2025

Beberapa kegiatan utama Komite Pemantau Manajemen Risiko pada tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

1. Tanggapan Tertulis dari Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atas Rencana Kerja Sama Pemanfaatan Bagian Tanah HPL Dengan PT Agro Indomas di Regional 3 Sampit;

Some of the Risk Management Monitoring Committee's main activities in 2025 include the following:

1. Written Response from the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) on the Planned Cooperation for Utilization of a Portion of HPL Land with PT Agro Indomas in Sampit Region 3;

2. Tanggapan Tertulis dari Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atas Rencana Kerja Sama Pemanfaatan Bagian Lahan HPL No.07/Kalibaru Dengan PT Adiguna Shipbuilding & Engineering (PT ASE);
3. Tanggapan Tertulis dari Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atas Rencana Kerja Sama Pengembangan dan Pengoperasian Terminal Curah Kering Belawan Tahap 2 PT Pelindo Multi Terminal dengan PT FKS Solusi Logistik;
4. Tanggapan Tertulis dari Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atas Rencana Kerja Sama Pemanfaatan Bagian Tanah HPL Pelabuhan Dengan PT Eastern Pearl Flour Mills di Regional 4 Makassar;
5. Persetujuan Dewan Komisaris atas Rencana Kerjasama Pemanfaatan Lahan oleh PT Pelita Agung Agrindustri di Regional 1 Dumai;
6. Persetujuan Dewan Komisaris atas Rencana Kerjasama Pemanfaatan Bagian Lahan HPL Nomor 01 PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dengan PT Jawa Lumbung Mas di Pelabuhan Panjang;
7. Persetujuan Dewan Komisaris atas Rencana Kerjasama Pemanfaatan Lahan oleh PT Calang Sejati Indah di Regional 2 Bengkulu;
8. Persetujuan Dewan Komisaris atas Rencana Kerjasama Pemanfaatan Lahan oleh PT Calang Sejati Indah di Regional 3 Kumai;
9. Persetujuan Dewan Komisaris atas Rencana Perpanjangan Kerjasama Pemanfaatan Bagian Tanah HPL Untuk Pengoperasian Tangki Timbun Curah Cair di Pelabuhan Banten oleh PT Taruna Bina Sarana;
10. Persetujuan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atas Rencana Kerjasama Pendayagunaan Asset tetap Berupa Bagian Tanah HPL Pelabuhan di Regional 2 Tanjung Priok dengan PT AKR Corporindo Tbk di Jalan Nusantara;
11. Persetujuan Dewan Komisaris atas Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama Penggunaan Tanah HPL dengan PT Indokarya Internusa di Regional 2 Palembang;
12. Permohonan Tanggapan Tertulis Kerjasama Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Pendukung Terminal Kijing;
13. Penyampaian Tanggapan Tertulis Atas Rencana Kerjasama Pemanfaatan Bagian Tanah HPL Pelabuhan Benoa dan Pemberian Hak Pakai di atas HPL Pelabuhan;
14. Permohonan Tanggapan Tertulis Kerjasama Pengelolaan dan Pengembangan Area Pengembangan I BMTH di Pelabuhan Benoa Bali.
15. Tanggapan Tertulis Atas Tindak Lanjut Evaluasi Rencana Kerjasama Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Pendukung Terminal Kijing;
16. Persetujuan Dewan Komisaris atas Dokumen Contingency Plan Tahun 2025;
17. Permohonan Persetujuan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Atas Rencana Perpanjangan Kerjasama Pemanfaatan Bagian Tanah

2. Written Response from the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) on the Planned Cooperation for Utilization of a Portion of HPL Land No. 07/Kalibaru with PT Adiguna Shipbuilding & Engineering (PT ASE);
3. Written Response from the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) on the Planned Cooperation for Development and Operation of Belawan Dry Bulk Terminal Phase 2 between PT Pelindo Multi Terminal and PT FKS Solusi Logistik;
4. Written Response from the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) regarding the Planned Cooperation Agreement for Utilization of Port HPL Land with PT Eastern Pearl Flour Mills in Region 4 Makassar;
5. Approval of the Board of Commissioners regarding the Planned Cooperation Agreement for Land Utilization by PT Pelita Agung Agrindustri in Region 1 Dumai;
6. Approval of the Board of Commissioners regarding the Planned Cooperation Agreement for Utilization of Port HPL Land No. 01 between PT Pelabuhan Indonesia (Persero) and PT Jawa Lumbung Mas in Panjang Port;
7. Approval of the Board of Commissioners regarding the Planned Cooperation Agreement for Land Utilization by PT Calang Sejati Indah in Region 2 Bengkulu;
8. Approval of the Board of Commissioners regarding the Planned Cooperation Agreement for Land Utilization by PT Calang Sejati Indah in Region 3 Kumai;
9. Approval of the Board of Commissioners regarding the Planned Extension of Cooperation Agreement for Utilization of Port HPL Land for the Operation of Liquid Bulk Storage Tanks at Banten Port by PT Taruna Bina Sarana;
10. Approval of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) on the Planned Collaboration for Utilization of Fixed Assets in the Form of Port Land Use (HPL) in Tanjung Priok Region 2 with PT AKR Corporindo Tbk on Jalan Nusantara;
11. Approval of the Board of Commissioners on the Extension of HPL Land Use Cooperation Agreement with PT Indokarya Internusa in Palembang Region 2;
12. Request for Written Response to the Cooperation Agreement for Development and Management of Kijing Terminal Support Area;
13. Submission of Written Response to the Planned Collaboration for Utilization of Benoa Port's HPL Land and the Granting of Usage Rights over the Port's HPL;
14. Request for Written Response to the Cooperation Agreement for Management and Development of Development Area I of BMTH at Benoa Port, Bali.
15. Written Response to the Follow-up Evaluation of the Planned Collaboration for Development and Management of Kijing Terminal Support Area;
16. Approval of the Board of Commissioners on the 2025 Contingency Plan Document;
17. Request for Approval from the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) regarding the Planned Extension of Land Management Rights (HPL)

Hak Pengelolaan (HPL) Untuk Pengoperasian Tangki Timbun Curah Cair di Pelabuhan Dumai Oleh PT Sarana Tempa Perkasa;
18. Persetujuan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atas Rencana Perpanjangan Kerja Sama Pengusahaan Aset Properti dengan PT AKR Corporindo Tbk di Regional 2 Pelabuhan Panjang dan Pelabuhan Banten;
19. Permohonan Persetujuan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Persero) terhadap Rencana Perpanjangan Kerjasama Pemanfaatan Lahan oleh PT AKR Corporindo, Tbk di Pelabuhan Belawan;
20. Persetujuan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atas Rencana Perpanjangan Kerja Sama Pemanfaatan Bagian Tanah HPL dengan PT AKR Corporindo Tbk di Regional 3;
21. Permohonan Persetujuan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Atas Perpanjangan Kerja Sama Penggunaan Tanah HPL oleh PT Andahanesa Abadi di Regional 2 Palembang;
22. Tanggapan Tertulis Dewan Komisaris Atas Rencana Kerja Sama Pemanfaatan Bagian Tanah HPL Pelabuhan dengan PT PLN Indonesia Power di Regional 3 Benoa;
23. Persetujuan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atas Rencana Perpanjangan Kerjasama Pemanfaatan Bagian Tanah HPL Pelabuhan dengan PT Rumah Sakit Pelabuhan di Regional 2 Palembang dan Cirebon;
24. Persetujuan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Atas Rencana Perpanjangan Kerja Sama Pemanfaatan Lahan oleh PT Tenaga Listrik Bengkulu di Pelabuhan Bengkulu.

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Komite Tata Kelola Terintegrasi membantu pengawasan Dewan Komisaris Induk Perusahaan dengan wewenang, tugas, dan fungsi sebagai berikut:
1. Melakukan evaluasi kebijakan Tata Kelola Terintegrasi;
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian kebijakan Tata Kelola Terintegrasi BUMN Induk atau Anak Perusahaan BUMN;
3. Melakukan evaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian internal dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Induk Perusahaan untuk penyempurnaan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi;
5. Melakukan komunikasi dengan unit kerja untuk fungsi antara lain Audit Intern, hukum dan kepatuhan, keuangan dan Manajemen Risiko, sumber daya manusia dan aspek fungsi operasional usaha yang diperlukan, untuk memperoleh informasi, klarifikasi serta meminta laporan yang diperlukan secara terintegrasi;

Collaboration for the Operation of Liquid Bulk Storage Tanks at Dumai Port by PT Sarana Tempa Perkasa;
18. Approval from the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) regarding the Planned Extension of Property Asset Management Cooperation with PT AKR Corporindo Tbk in Region 2, Panjang Port, and Banten Port;
19. Request for Approval from the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) regarding the Planned Extension of Land Utilization Cooperation by PT AKR Corporindo, Tbk in Belawan Port;
20. Approval from the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) regarding the Planned Extension of Land Management Rights (HPL) Collaboration with PT AKR Corporindo Tbk in Region 3;
21. Request for Approval from the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) for the Extension of the Land Use Cooperation Agreement (HPL) by PT Andahanesa Abadi in Region 2 Palembang;
22. Written Response from the Board of Commissioners regarding the Planned Cooperation Agreement for Utilization of Port HPL Land with PT PLN Indonesia Power in Region 3 Benoa;
23. Approval from the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) for the Planned Extension of Land Use Cooperation Agreement (HPL) with PT Rumah Sakit Pelabuhan in Region 2 Palembang and Cirebon;
24. Approval from the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) for the Planned Extension of Land Use Cooperation Agreement by PT Tenaga Listrik Bengkulu at Bengkulu Port.

INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE

INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE DUTIES AND RESPONSIBILITIES

Integrated Governance Committee assists the Holding Company's Board of Commissioners in overseeing with authority, tasks, and functions as follows:
1. Conducting evaluations of Integrated Governance policies;
2. Monitoring and evaluating the compliance of Integrated Governance policies of SOE's Holding Company or Subsidiaries;
3. Evaluating the Integrated Governance implementation, at least through assessing the adequacy of internal controls and integrated compliance functions;
4. Providing recommendations to the Holding Company's Board of Commissioners for the enhancement of Integrated Governance policies;
5. Communicating with work units such as Internal Audit, Legal and Compliance, Finance and Risk Management, Human Resources, and operational business aspects as necessary, to obtain information, clarifications, and request integrated reports;

6. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi Tata Kelola Terintegrasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS/Menteri;
7. Mengakses catatan atau informasi tentang asset dan sumber daya lainnya dan memasuki pekarangan, gedung, serta kantor yang dipergunakan oleh Perseroan;
8. Meminta penjelasan dari organ pengelola risiko dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;
9. Menjalankan wewenang, tugas, dan tanggung jawab lain yang terkait dengan fungsinya.

PIAGAM KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Tata Kelola Terintegrasi mengacu pada Piagam Komite Tata Kelola terintegrasi yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 09/KEP-DK/PI/VII-2023 tanggal 3 Juli 2023 tentang Penetapan Piagam (Charter) Komite Tata Kelola Kelola Terintegrasi (KTKT) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia. Adapun isi Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi yaitu:

1. Landasan Hukum
2. Pengertian
3. Komposisi dan Struktur
4. Wewenang, Tugas dan Fungsi
5. Persyaratan Keanggotaan
6. Rapat
7. Akses Kerahasiaan Informasi
8. Laporan
9. Penghasilan Anggota
10. Program Pelatihan Berkelanjutan
11. Penggunaan Tenaga Ahli
12. Penilaian Kinerja
13. Hubungan Kelembagaan
14. Lain-lain
15. Penutup

MASA JABATAN KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Masa tugas angggota Komite Tata Kelola Terintegrasi tidak boleh lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

STRUKTUR, KEANGGOTAAN DAN KEAHLIAN KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

6. Monitoring and evaluating the implementation of other Integrated Governance functions in accordance with legal regulations, articles of association, and/or resolutions of GMS/Minister;
7. Accessing records or information about assets and other resources and entering premises, buildings, and offices used by the Company;
8. Requesting explanations from risk management organs and/or other officials regarding any matters related to Company's management;
9. Carrying out other authorities, tasks, and responsibilities related to its functions.

INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE CHARTER

In carrying out its duties and responsibilities, the Integrated Governance Committee refers to its Charter that has been established based on Board of Commissioners' Decree No.09/KEP-DK/PI/VII-2023 dated July 3, 2023, regarding the Establishment of the Integrated Governance Committee Charter of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Company. The Integrated Governance Committee Charter's contents are as followings:

1. Legal Basis;
2. Definition;
3. Composition and Structure;
4. Authority, Duties, and Functions;
5. Membership Requirements;
6. Meetings;
7. Access to Confidential Information;
8. Reports;
9. Member's Income;
10. Continuous Training Program;
11. Use of Experts
12. Performance Assessment;
13. Institutional Relationship;
14. Others;
15. Closing.

TENURE OF INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE

The tenure of Integrated Governance Committee members shall not be longer than the tenure of Board of Commissioners as stipulated in the Articles of Association and may be re-elected only for the next 1 (one) period.

STRUCTURE, MEMBERSHIP AND EXPERTISE OF INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE

Nama Name	**Jabatan** Position	**Keterangan** Description	**Keahlian** Expertise
Agus Suhartono	Ketua Chairman	Komisaris Utama Holding President Commissioner of the Holding	Ekonomi Manajemen
Elwi Danil	Anggota Member	Komisaris Holding Commissioner of the Holding	Hukum
Maximianus	Anggota Member	Komisaris Holding Commissioner of the Holding	Akuntansi

Nama Name	Jabatan Position	Keterangan Description	Keahlian Expertise
Arief Poyuono	Anggota Member	Komisaris Holding Commissioner of the Holding	Ekonomi, Ilmu Komunikasi
Moermahadi Soerja Djanegara	Anggota Member	Komisaris Utama PT PTP President Commissioner of PT PTP	Akuntansi
Darwanto	Anggota Member	Komisaris Utama PT PMT President Commissioner of PT PMT	Administrasi Publik
Otto Ardianto	Anggota Member	Komisaris Utama PT PJM President Commissioner of PT PJM	Teknik Industri, Administrasi Bisnis
Fachry Ali	Anggota Member	Komisaris Utama PT PSL President Commissioner of PT PSL	Sosiologi

PROFIL KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Profil Komite Tata Kelola Terintegrasi per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE PROFILE

The profile of Integrated Governance Committee as of December 31, 2025, is as follows.

Agus Suhartono

Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi/Komisaris Utama
Chairman of Integrated Governance Committee/President Commissioner

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.
The profile can be found in the Board of Commissioners Profile section of this Annual Report.

Periode dan Masa Jabatan | Period and Term of Office:
Periode dan Masa Jabatan Komite Tata Kelola Terintegrasi sesuai dengan periode dan masa jabatan sebagai Dewan Komisaris.
The period and term of office of Integrated Governance Committee correspond to the period and term of office of Board of Commissioners.

Elwi Danil

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi/Komisaris
Member of Integrated Governance Committee/Commissioner

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.
The profile can be found in the Board of Commissioners Profile section of this Annual Report.

Periode dan Masa Jabatan | Period and Term of Office:
Periode dan Masa Jabatan Komite Tata Kelola Terintegrasi sesuai dengan periode dan masa jabatan sebagai Dewan Komisaris.
The period and term of office of Integrated Governance Committee correspond to the period and term of office of Board of Commissioners.

Heru Sukanto

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi/Komisaris
Member of Integrated Governance Committee/Commissioner

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.
The profile can be found in the Board of Commissioners Profile section of this Annual Report.

Periode dan Masa Jabatan | Period and Term of Office:
Periode dan Masa Jabatan Komite Tata Kelola Terintegrasi sesuai dengan periode dan masa jabatan sebagai Dewan Komisaris.
The period and term of office of Integrated Governance Committee correspond to the period and term of office of Board of Commissioners.

Andus Winarno

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi/Komisaris
Member of Integrated Governance Committee/Commissioner

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.
The profile can be found in the Board of Commissioners Profile section of this Annual Report.

Periode dan Masa Jabatan | Period and Term of Office:
Periode dan Masa Jabatan Komite Tata Kelola Terintegrasi sesuai dengan periode dan masa jabatan sebagai Dewan Komisaris.
The period and term of office of Integrated Governance Committee correspond to the period and term of office of Board of Commissioners.

Moermahadi Soerja Djanegara

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Member of Integrated Governance Committee

Warga Negara Indonesia
Indonesian

Jakarta
Jakarta

Bandung, 31 Mei 1955/usi 69 tahun per Desember 2024
Bandung, May 31, 1955/age 70 as of December 2025

Periode Pertama : Periode I : 2021 - sekarang
Term I: 2021 - present

Riwayat Pendidikan Educational Background	• S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran, Bandung (1981), Akuntan Register Negara • S2 STIE IPWI • S3 Bidang Ilmu Ekonomi Akuntansi Universitas Padjadjaran, Bandung (2005) • Bachelor's degree in Accounting, Faculty of Economics, Padjadjaran University, Bandung (1981), State Registered Accountant • Master's degree in Economics, IPWI (Indonesian Institute of Economics and Business) • Doctorate in Accounting, Padjadjaran University, Bandung (2005)
Sertifikasi Certification	• Asean Chartered Professional Accountant (ASEAN CPA) • Certified State Finance Auditor (CSFA) • Register Akuntan Neagara • Charter Accountant (CA) • Certified Public Accountant of Indonesia (CPA) • ASEAN Chartered Professional Accountant (ASEAN CPA) • Certified State Finance Auditor (CSFA) • State Registered Accountant • Chartered Accountant (CA) • Certified Public Accountant of Indonesia (CPA)
Pengalaman Kerja Work Experience	• Ketua BPK RI (2017-2019) • Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2020-2021) • Komisaris Independen PT Bayan Recources Tbk (2021-sekarang) • Komisaris Utama PT Terminal Petikemas Indonesia (2021-sekarang) • Chairman of the Supreme Audit Agency (BPK RI) (2017-2019) • President Commissioner of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2020-2021) • Independent Commissioner of PT Bayan Resources Tbk (2021-present) • President Commissioner of PT Terminal Petikemas Indonesia (2021-present)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Keputusan Sirkuler Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Terminal Petikemas Indonesia Nomor: KP.03/1/10/2/MTAK/UTMA/PLND-21 Circular Resolution of Shareholders in lieu of the General Meeting of Shareholders of Limited Liability Company PT Terminal Petikemas Indonesia Number: KP.03/1/10/2/MTAK/UTMA/PLND-21
Jabatan Rangkap Concurrent Position	• Komisaris Independen PT Bayan Recources Tbk (2021-sekarang) • Komisaris Utama PT Terminal Petikemas Indonesia (2021-sekarang) • Independent Commissioner of PT Bayan Resources Tbk (2021-present) • President Commissioner of PT Terminal Petikemas Indonesia (2021-present)

Darwanto

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Member of Integrated Governance Committee

Warga Negara Indonesia
Indonesian

Jakarta
Jakarta

Rangkasbitung, 13 September 1961/Usia 63 tahun Per Desember 2024
Rangkasbitung, September 13, 1961 / Age 64 as of December 2025

Periode I : 2021 - sekarang
Term I: 2021-present

Riwayat Pendidikan Educational Background	• Sarjana Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya • Magister Administrasi Publik Universitas Hang Tuah Surabaya (2004) • Bachelor of Law, Hang Tuah University, Surabaya • Master of Public Administration, Hang Tuah University, Surabaya (2004)
Sertifikasi Certification	Certified Risk Governance Professional Certified Risk Governance Professional
Pengalaman Kerja Work Experience	• Panglima Armada Kawasan Timur (2015-2018) • Staf Khusus Kasal (2018 – 2020) • Kepala Bidang Perencanaan KKIP (2020) • Komisaris PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2021) • Komisaris Utama PT Pelindo Multi Terminal (2021 – sekarang) • Commander of the Eastern Fleet (2015-2018) • Special Staff to the Chief of Naval Staff (2018-2020) • Head of Planning for the Port Authority (KKIP) (2020) • Commissioner of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2021) • President Commissioner of PT Pelindo Multi Terminal (2021-present)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Keputusan Sirkuler Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Terminal Petikemas Indonesia Nomor: KP.03/1/10/2/MTAK/UTMA/PLND-21 Circular Resolution of Shareholders in lieu of the General Meeting of Shareholders of the Limited Liability Company PT Terminal Petikemas Indonesia Number: KP.03/1/10/2/MTAK/UTMA/PLND-21
Jabatan Rangkap Concurrent Position	Komisaris Utama PT Pelindo Multi Terminal (2021 – sekarang) President Commissioner of PT Pelindo Multi Terminal (2021-present)

Otto Ardianto

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Member of Integrated Governance Committee

Warga Negara Indonesia
Indonesian

Jakarta
Jakarta

Rangkasbitung, 13 September 1961/Usia 63 tahun Per Desember 2024
Rangkasbitung, September 13, 1961 / Age 64 as of December 2025

Periode I : 2023 - sekarang
Term I: 2023 - present

Tempat dan Tanggal Lahir/ Usia Place and Date of Birth/Age	Jakarta, 08 Oktober 1974/Usia 50 tahun per Desember 2024 Jakarta, October 8, 1974/Age 51 as of December 2025
Riwayat Pendidikan Educational Background	• Sarjana Teknik Industri Universitas Indonesia (1997) • Magister Administrasi Bisnis University of Toronto (2006) • Bachelor of Industrial Engineering, University of Indonesia (1997) • Master of Business Administration, University of Toronto (2006)
Sertifikasi Certification	Qualified Risk Governance Professional (QRGP) Qualified Risk Governance Professional (QRGP)
Pengalaman Kerja Work Experience	• President Director of Mulia Multi Mandiri and Financial Director of PT Bintang Sidoraya (2007-2012) • Commercial VP and Head of Government Relation (2013-2017) • Staf Khusus Menteri Bidang Keuangan dan Investasi Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (2017 – sekarang) • Komisaris Utama Merangkap Komisaris Independen PT Pelindo Solusi Logistik (2021 – sekarang) • President Director of Mulia Multi Mandiri and Financial Director of PT Bintang Sidoraya (2007-2012) • Commercial VP and Head of Government Relations (2013-2017) • Special Staff to the Minister for Finance and Investment, Ministry of Transportation, Republic of Indonesia (2017-present) • President Commissioner and Independent Commissioner of PT Pelindo Solusi Logistik (2021-present)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar RUPS antara PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan PT Integrasi Logistik Cipta Solusi Nomor KP.03/24/215/RKTK/UTMA/PLND-23 dan Nomor SK.03/24/2/5/HKP/DRU/PSD-23 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Komisaris PT Pelindo Jasa Maritim Circular Resolution of Shareholders in lieu of the GMS between PT Pelabuhan Indonesia (Persero) and PT Integrasi Logistik Cipta Solusi No. KP.03/24/215/RKTK/UTMA/PLND-23 and No. Decree No. SK.03/24/2/5/HKP/DRU/PSD-23 concerning the Dismissal and Appointment of Board of Commissioners of PT Pelindo Jasa Maritim
Periode dan Masa Jabatan Period and Tenure	Periode I : 2023 - sekarang Term I: 2023 - present
Jabatan Rangkap Concurrent Position	• Staf Khusus Menteri Bidang Keuangan dan Investasi Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (2017 – sekarang) • Komisaris Utama Merangkap Komisaris Independen PT Pelindo Solusi Logistik (2021 – sekarang) • Special Staff to the Minister for Finance and Investment, Ministry of Transportation, Republic of Indonesia (2017 - present) • President Commissioner and Independent Commissioner of PT Pelindo Solusi Logistik (2021 - present)

Tempat dan Tanggal Lahir/ Usia Place and Date of Birth/Age	Aceh Barat Daya, 23 November 1954 / Usia 70 tahun per Desember 2024 Southwest Aceh, November 23, 1954 / Age 71 as of December 2025
Riwayat Pendidikan Educational Background	• Sarjana Sejarah dan Peradaban Islam Institut Agama Islam Negeri Ciputat • Master of Arts dalam Sejarah Asia Tenggara dari Monash University (1994) • Bachelor of History and Islamic Civilization, Ciputat State Islamic Institute • Master of Arts in Southeast Asian History from Monash University (1994)
Sertifikasi Certification	Qualified Risk Governance Professional (QRGP) Qualified Risk Governance Professional (QRGP)
Pengalaman Kerja Work Experience	• Komisaris PT Indonesia Kendaraan Terminal (IKT) (2014-2016) • Komisaris Utama (PT Timah Tbk) (2015-2020) • Penasehat Ahli Kapolri Bidang Politik Kepolisian Negara RI (1998-Sekarang) • Komisaris Utama PT Pelindo Solusi Logistik (2023 – sekarang) • Commissioner of PT Indonesia Kendaraan Terminal (IKT) (2014-2016) • President Commissioner (PT Timah Tbk) (2015-2020) • Expert Advisor to the Chief of Police for Political Affairs of the Indonesian National Police (1998-Present) • President Commissioner of PT Pelindo Solusi Logistik (2023-present)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham • Nomor : KP.03/24/2/7/RKTK/UTMA/PLND-23 • Nomor : SK-004/PPI-SK.DIR/II/2023 • Nomor : SK.03/24/2/7/HKP/DRU/PSD-23 Shareholders' Circular Resolution • Number: KP.03/24/2/7/RKTK/UTMA/PLND-23 • Number: SK-004/PPI-SK.DIR/II/2023 • Number: SK.03/24/2/7/HKP/DRU/PSD-23
Periode dan Masa Jabatan Period and Tenure	Periode I : 2023 - sekarang Term I: 2023 - present
Jabatan Rangkap Concurrent Position	• Penasehat Ahli Kapolri Bidang Politik Kepolisian Negara RI (1998-Sekarang) • Penasihat Menteri Badan Perencanaan Nasional (2021 – Sekarang) • Komisaris Utama PT Pelindo Solusi Logistik (2023 – sekarang) • Expert Advisor to the Chief of Police for Political Affairs of the Indonesian National Police (1998-present) • Advisor to the Minister of the National Planning Agency (2021-present) • President Commissioner of PT Pelindo Solusi Logistik (2023-present)

KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN KERJA KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE EDUCATIONAL QUALIFICATIONS AND WORK EXPERIENCE

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi
Integrated Governance Committee Education Qualification and Work Experience

Nama Name	**Jabatan** Position	**Pendidikan** Education	**Pengalaman Kerja** Work experience
Agus Suhartono	Ketua Chairman	• Akademi Angkatan Laut • S1 bidang Ekonomi dari Naval Academy • Naval Academy • Bachelor's Degree in Economics from the Naval Academy	Memiliki pengalaman kerja di TNI Angkatan Laut Experience working in the Indonesian Navy
Elwi Danil	Anggota Member	• S1 Hukum • S2 Hukum • S3 Hukum • Bachelor's Degree in Law • Master's Degree in Law • Doctorate in Law	Memiliki pengalaman kerja di bidang Hukum & Pendidikan Experience working in Law & Education
Maximianus	Anggota Member	S1 bidang Akuntansi Bachelor's Degree in Accounting	Memiliki pengalaman kerja di bidang Lembaga jasa keuangan Experience working in financial services institutions
Arief Poyuono	Anggota Member	• S1 bidang Ekonomi • S2 bidang Ilmu Komunikasi • Bachelor's Degree in Economics • Master's Degree in Communication Studies	Memiliki pengalaman kerja di Metro Kajang Berhad dan PT Argo Artha Surya Experience working at Metro Kajang Berhad and PT Argo Artha Surya

Tabel Kualifikasi Pendidikan dan Pengalaman Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi
Integrated Governance Committee Education Qualification and Work Experience

Nama Name	**Jabatan** Position	**Pendidikan** Education	**Pengalaman Kerja** Work experience
Moermahadi Soerja Djanegara	Anggota Member	• S1 Akuntansi • S2 Manajemen • S3 Ilmu Ekonomi Akuntansi • Bachelor's Degree in Accounting • Master's Degree in Management • Doctorate in Accounting Economics	Memiliki pengalaman kerja di bidang pengawasan Perseroan Experience working in corporate oversight
Darwanto	Anggota Member	S2 Administrasi Publik Master's Degree in Public Administration	Memiliki pengalaman kerja di bidang pengawasan Perseroan Experience working in corporate oversight
Otto Ardianto	Anggota Member	• S1 Teknik Industri • S2 Administrasi Bisnis • Bachelor's Degree in Industrial Engineering • Master's Degree in Business Administration	Memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan Experience working in government affairs
Fachry Ali	Anggota Anggota Member	S2 Arts dalam Sejarah Asia Tenggara Master's Degree in Arts in Southeast Asian History	Memiliki pengalaman kerja di bidang pengawasan Perseroan Experience working in corporate oversight

INDEPENDENSI KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Komite Tata Kelola Terintegrasi melaksanakan fungsi dan tugasnya secara profesional dan independen, tanpa campur tangan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan Piagam Komite Audit, kualifikasi independensi dari anggota Komite Audit harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE INDEPENDENCE

The Integrated Governance Committee carries out its functions and duties professionally and independently, without interference from any party that is not in accordance with the laws and regulations. In accordance with the Integrated Governance Committee Charter, independence qualifications of Integrated Governance Committee members must meet the following criteria:

Tabel Independensi Komite Tata Kelola Terintegrasi
Integrated Corporate Governance Committee Independence

Aspek Independensi Independence Aspect	**Agus Suhartono**	**Elwi Danil**	**Maximianus**	**Arief Poyuono**	**Moermahadi Soerja Djanegara**	**Moermahadi Soerja Djanegara**	**Darwanto**	**Otto Ardianto**	**Fachry Ali**
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Has no financial relationship with Board of Commissioners and Board of Directors	√	√	√	√	√	√	√	√	√

Tabel Independensi Komite Tata Kelola Terintegrasi
Integrated Corporate Governance Committee Independence

Aspek Independensi Independence Aspect	**Agus Suhartono**	**Elwi Danil**	**Maximianus**	**Arief Poyuono**	**Moermahadi Soerja Djanegara**	**Moermahadi Soerja Djanegara**	**Darwanto**	**Otto Ardianto**	**Fachry Ali**
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi Has no managerial relationship in the Company, subsidiary, or affiliated Company	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan Does not have share ownership relationship in the Company	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi Does not have family relationship with Board of Commissioners, Board of Directors, and/or fellow members of Nomination and Remuneration Committee	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah Does not serve as administrator of political parties, official and government	√	√	√	√	√	√	√	√	√

PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI PADA TAHUN 2025

TRAINING AND/OR COMPETENCY DEVELOPMENT OF INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE IN 2025

Nama Name	**Jabatan** Position	**Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan** Type of Training and Development Materials Competency/Training	**Waktu dan Tempat Pelaksanaan** Time and Venue	**Penyelenggara** Organizer
Agus Suhartono	Ketua Chairman	Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada Bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris dalam Bab Corporate Governance Laporan Tahunan ini. Training and/or Competency Development can be seen in Board of Commissioners Training and/or Competency Development Section in the Corporate Governance Chapter of this Annual Report.		
Elwi Danil	Anggota Member	Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada Bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris dalam Bab Corporate Governance Laporan Tahunan ini. Training and/or Competency Development can be seen in Board of Commissioners Training and/or Competency Development Section in the Corporate Governance Chapter of this Annual Report.		
Heru Sukanto	Anggota Member	Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada Bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris dalam Bab Corporate Governance Laporan Tahunan ini.		
Andus Winarno	Anggota Member	Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada Bagian Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris dalam Bab Corporate Governance Laporan Tahunan ini. Training and/or Competency Development can be seen in Board of Commissioners Training and/or Competency Development Section in the Corporate Governance Chapter of this Annual Report.		
Moermahadi Soerja Djanegara	Anggota Member	Sertifikasi CAFG (Certified Anti Fraud Governance) CAFG (Certified Anti Fraud Governance) Certification	Kamis-Jumat, 18-19 September 2025 Thursday-Friday, September 18-19, 2025	PT GRC Management
Darwanto	Anggota Member	Sertifikasi CAFG (Certified Anti Fraud Governance) CAFG (Certified Anti Fraud Governance) Certification	Kamis-Jumat, 18-19 September 2025 Thursday-Friday, September 18-19, 2025	PT GRC Management
Otto Ardianto	Anggota Member	Sertifikasi CAFG (Certified Anti Fraud Governance) CAFG (Certified Anti Fraud Governance) Certification	Kamis-Jumat, 18-19 September 2025 Thursday-Friday, September 18-19, 2025	PT GRC Management
Fachry Ali	Anggota Member	Sertifikasi CAFG (Certified Anti Fraud Governance) CAFG (Certified Anti Fraud Governance) Certification	Kamis-Jumat, 18-19 September 2025 Thursday-Friday, September 18-19, 2025	PT GRC Management

RAPAT KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE MEETING

KEBIJAKAN RAPAT KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

1. KTKT mengadakan rapat yang pesertanya diikuti anggota dari Induk Perusahaan dan Anak Perusahaan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
2. Rapat KTKT dipimpin oleh Ketua atau anggota KTKT dari Induk Perusahaan yang paling senior, apabila Ketua berhalangan hadir;

INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE MEETING POLICY

1. Integrated Governance Committee (IGC) holds meetings whose participants are members of the Parent Company and Subsidiaries at least 1 (one) time in 3 (three) months;
2. IGC meeting is chaired by the Chairman or the most senior member of IGC from the Parent Company, if the Chairman is unable to attend;

3. Jika dipandang perlu, KTKT dapat mengundang pihak Direksi dan/atau Manajemen yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat KTKT;
4. Setiap rapat KTKT dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh Ketua KTKT dilampiri daftar hadir peserta rapat;
5. KTKT dapat secara langsung ataupun meminta Sekretaris Dewan Komisaris Perusahaan Induk untuk membuat dan menyampaikan panggilan rapat kepada seluruh peserta secara tertulis.

3. If deemed necessary, IGC may invite the Board of Directors and/or Management related to the meeting material to attend IGC meeting;
4. Each IGC meeting is outlined in the minutes of meeting signed by the Chairman of IGC accompanied by a list of meeting participants present;
5. IGC can directly or ask the Secretary of Board of Commissioners of the Parent Company to make and convey a meeting summons to all participants in writing.

AGENDA RAPAT KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Sepanjang tahun 2025, tanggal pelaksanaan, Agenda rapat dan Peserta rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi, sebagai berikut.

INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE MEETING AGENDA

Throughout 2025, the Integrated Governance Committee meeting dates, agendas, and participants are as follows.

Tabel Agenda Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi
Tabel Agenda Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Meeting Participants
1	17 Februari 2025	• Hal-hal yang perlu mendapat perhatian atas Konsep Temuan BPK; • Update Profil dan Strategi Risiko Tahun 2025; • Update Pembahasan RJPP Subholding dan Holding 2025-2029; • Pembahasan Tata Kelola/Kebijakan terkait Mekanisme Pengambilan Keputusan Strategis; • Isu-isu strategis lainnya. • Matters requiring attention regarding BPK's Conceptual Findings; • Update on the 2025 Risk Profile and Strategy; • Update on the Discussion of 2025-2029 Subholding and Holding Long-Term Plan; • Discussion on Governance/Policies related to Strategic Decision-Making Mechanisms; • Other strategic issues.	• Agus Suhartono • Elwi Danil • Heru Sukanto • Andus Winarno • Moermahadi Soerja Djanegara • Darwanto • Otto Ardianto • Fachry Ali
2	26 Mei 2025	• Update pembahasan tindak lanjut insiden kemacetan Tanjung Priok; • Update laporan hasil implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan Tahun 2024; • Update terkait arahan pelaksanaan RUPS dan Aksi Korporasi BUMN/ Anak Usaha BUMN dari Danantara. • Update on the follow-up discussion on Tanjung Priok traffic jam incident; • Update on the 2024 Anti-Bribery Management System implementation report; • Update on Danantara's directives on the implementation of GMS and Corporate Actions for State-Owned Enterprises/State-Owned Enterprise Subsidiaries.	• Agus Suhartono • Elwi Danil • Heru Sukanto • Andus Winarno • Moermahadi Soerja Djanegara • Darwanto • Otto Ardianto • Fachry Ali
3	13 Agustus 2025	• Evaluasi Risiko Utama Triwulan II Tahun 2025; • Profil Risiko Utama Tahun 2026; • Update hasil pembahasan joint procurement KAP Tahun Buku 2025; • Hal-hal strategis lainnya. • Evaluation of Key Risks for the Second Quarter of 2025; • Key Risk Profile for 2026; • Update on the results of joint procurement discussion with Public Accounting Firm for Fiscal Year 2025; • Other strategic matters.	• Agus Suhartono • Elwi Danil • Heru Sukanto • Andus Winarno • Moermahadi Soerja Djanegara • Darwanto • Otto Ardianto • Fachry Ali
4	18 November 2025	• Update Profil Risiko Per TW III 2025; • Update Perencanaan Manajemen Risiko pada RKAP 2026; • Update Hasil Temuan Audit Internal s.d. TW III 2025; • Hal-hal strategis lainnya. • Update on the Risk Profile as of the Third Quarter of 2025; • Update on Risk Management Planning in the 2026 Work Plan and Budget (RKAP); • Update on Internal Audit Findings as of the Third Quarter of 2025; • Other strategic matters.	• Agus Suhartono • Elwi Danil • Heru Sukanto • Andus Winarno • Moermahadi Soerja Djanegara • Darwanto • Otto Ardianto • Fachry Ali

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE MEETING FREQUENCY AND ATTENDANCE

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi
Integrated Governance Committee Meeting Attendance

Nama Name	**Jabatan** Position	**Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi** Integrated Governance Committee Meeting		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran Number and Percentage of Attendance		
		Jumlah Rapat Number of Meetings	**Jumlah Kehadiran** Number of Meetings	**Persentase** Percentage
Agus Suhartono	Ketua Chairman	4	4	100%
Elwi Danil	Anggota Member	4	4	100%
Heru Sukanto	Anggota Member	4	4	100%
Andus Winarno	Anggota Member	4	4	100%
Moermahadi Soerja Djanegara	Anggota Member	4	4	100%
Darwanto	Anggota Member	4	4	100%
Otto Ardianto	Anggota Member	4	4	100%
Fachry Ali	Anggota Member	4	4	100%
Agus Suhartono	Ketua Chairman	4	4	100%

PROGRAM KERJA DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI TAHUN 2025

Selama tahun 2025, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya antara lain:

1. Melakukan evaluasi kebijakan tata kelola terintegrasi.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian kebijakan tata kelola terintegrasi Perusahaan Induk dan anak perusahaan.
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Induk Perusahaan untuk penyempurnaan kebijakan tata kelola terintegrasi.
4. Melakukan komunikasi dengan unit kerja untuk fungsi antara lain Audit Intern, Hukum dan Kepatuhan, Keuangan & Manajemen Risiko, Sumber Daya Manusia dan aspek fungsi operasional usaha yang diperlukan untuk memperoleh informasi, klarisikasi serta meminta laporan yang diperlukan secara terintegrasi.
5. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran KTKT Tahun 2026.
6. Menyusun Laporan KTKT kepada Dewan Komisaris Induk Perusahaan.
7. *Self Assessment* Kinerja KTKT.

   Penugasan khusus relevan dengan bidang Tata Kelola Terintegrasi.

WORK PROGRAM AND IMPLEMENTATION OF DUTIES OF INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE IN 2025

Throughout 2025, Integrated Governance Committee has carried out its duties and responsibilities, including:

1. Conducting an evaluation of integrated governance policies.
2. Monitoring and evaluating the alignment of integrated governance policies between the Parent Company and its subsidiaries.
3. Providing recommendations to the Board of Commissioners of the Parent Company for the enhancement of integrated governance policies.
4. Communicating with relevant work units, such as Internal Audit, Legal and Compliance, Finance & Risk Management, Human Resources, and other operational functions, to obtain information, clarifications, and request necessary reports in an integrated manner.
5. Preparing the 2026 Work Plan and Budget of Integrated Governance Committee.
6. Preparing the Integrated Governance Committee Report to Board of Commissioners of the Parent Company.
7. Conducting a self-assessment of the Committee's performance.
   Carrying out special assignments relevant to the field of integrated governance.

ORGAN DAN KOMITE DI BAWAH DIREKSI

SEKRETARIAT PERUSAHAAN

Sekretariat Perusahaan merupakan organ tata kelola perusahaan yang memegang peran signifikan sebagai Compliance Officer yang membantu Direksi dalam penerapan prinsip-prinsip GCG serta memenuhi ketentuan terhadap praktik GCG. General Head President Sekretariat Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan bertugas mengemban misi untuk mendukung terciptanya citra perusahaan yang baik secara konsisten dan berkesinambungan melalui program komunikasi yang efektif kepada segenap *stakeholders*.

DASAR PENGANGKATAN SEKRETARIAT PERUSAHAAN

Sekretariat Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal Perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara. Manajemen telah membuat Berita Acara Kesepakatan Direksi dan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No KP.03/1/10/1/RTK/UTMA/PLND-21 tanggal 1 Oktober 2021 tentang Persetujuan Pengangkatan Pekerjaan Pada Jabatan Sekretariat Perusahaan dan Satuan Pengendalian Internal PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

ORGANS AND COMMITTEES UNDER BOARD OF DIRECTORS

CORPORATE SECRETARIAT

Corporate Secretariat is a corporate governance organ that plays a significant role as a Compliance Officer who assists Board of Directors in implementing GCG principles and complying with the provisions of GCG practices. General Head President of Corporate Secretariat of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) reports directly to President Director and is tasked with carrying out the mission to support the creation of a consistent and sustainable good corporate image through effective communication programs to all stakeholders.

CORPORATE SECRETARIAT APPOINTMENT BASIS

Corporate Secretariat is appointed and dismissed by President Director based on the Company's internal mechanism under the approval of Board of Commissioners/Supervisory Board. This is in accordance with the Minister of SOE Regulation No. PER-01/MBU/2011 concerning Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises. The management has made Minutes of Agreement of Board of Directors and Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. KP.03/1/10/1/RTK/UTMA/PLND-21 dated October 1, 2021 regarding Approval of Appointment at Corporate Secretariat and Internal Audit Unit PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

STRUKTUR SEKRETARIAT PERUSAHAAN

CORPORATE SECRETARIAT STRUCTURE

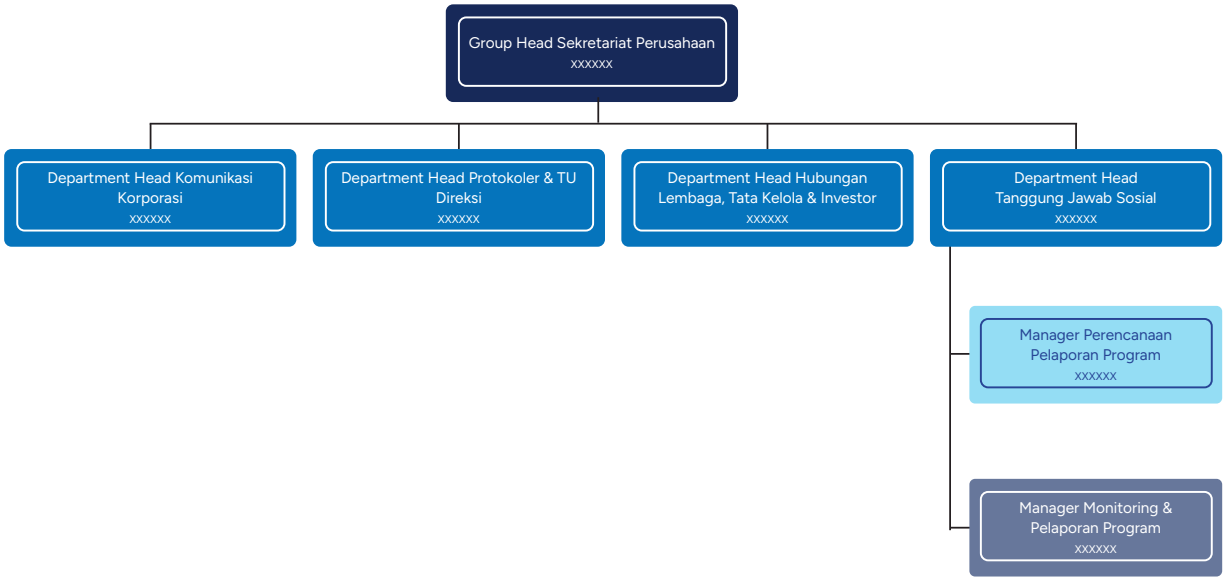

FUNGSI, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIAT PERUSAHAAN

Fungsi

Bertanggung jawab untuk memastikan dan mengkoordinasikan rencana dan program kerja bidang pengelolaan kegiatan komunikasi korporasi, tanggung jawab sosial, protokoler dan Tata Usaha Direksi, hubungan lembaga, penerapan tata kelola korporasi, serta kegiatan hubungan investor, dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, untuk memastikan tersedianya informasi yang dibutuhkan bagi Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta, tersedianya laporan manajemen triwulan dan tahunan, Sebagai penghubung (*liaison officer*) untuk membina Hubungan dengan Lembaga/Instansi Pemerintah dan/atau non Pemerintah pada skala Nasional, serta penyelenggaraan rapat Direksi, pengadaan bahan rapat Direksi dan penyusunan risalah rapat Direksi.

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Mengelola, memutuskan dan me*review* rencana dan implementasi program kerja dan anggaran terkait bidang pengelolaan kegiatan komunikasi korporasi, tanggung jawab sosial, protokoler dan tata usaha Direksi, hubungan lembaga, penerapan tata kelola

CORPORATE SECRETARY FUNCTIONS, DUTIES AND RESPONSIBILITIES

Functions

Responsible for ensuring and coordinating work plans and programs in the field of corporate communication activities management, social responsibility, protocol and administration of Board of Directors, institutional relations, implementation of corporate governance, as well as investor relations activities, are carried out in accordance with applicable regulations, to ensure the availability of information needed by Board of Directors and Board of Commissioners on a regular basis and/or at any time if requested, the availability of quarterly and annual management report, as a liaison officer to foster Relations with Government Institutions/Agencies and/or non-Government on a National scale, as well as holding meetings of Board of Directors, preparation of briefing sheets for Board of Directors meetings and making minutes of Board of Directors meetings.

Duties and Responsibilities

1. Manage, decide and review the plans and implementation of work programs and budgets related to the corporate communication activities management, social responsibility, protocol and administration of Board of Directors, institutional

korporasi, serta kegiatan hubungan investor di lingkungan Perusahaan;

2. Melakukan review dan evaluasi terhadap:
   a. Usulan rencana kegiatan terkait dengan penyebaran informasi kepada pihak internal ataupun eksternal serta peningkatan *corporate identity*;
   b. Laporan Manajemen Triwulanan, Tahunan untuk dapat disampaikan ke Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;
   c. Usulan kebijakan peraturan perusahaan terkait dengan GCG beserta kebijakan turunan yang lainnya seperti *Board Manual* (Tata Kelola Direksi dan Dewan Komisaris), Kode Etik Perusahaan, Pedoman Gratifikasi dan *Whistleblowing System* (WBS);
   d. Usulan *framework*/metode pengendalian GCG, Board Manual (Tata Kelola Direksi dan Dewan Komisaris), Kode Etik Perusahaan, Pedoman Gratifikasi dan *Whistleblowing System* (WBS);
   e. Tindak lanjut hasil penilaian/pemeriksaan penerapan GCG, *Board Manual* (Tata Kelola Direksi dan Dewan Komisaris, Kode Etik Perusahaan, Pedoman Gratifikasi dan *Whistleblowing System* (WBS);
   f. Usulan rencana kegiatan program pelayanan masyarakat meliputi Kemitraan, Bina Lingkungan dan CSR;
   g. Hasil evaluasi terhadap proposal atau usulan kegiatan pelayanan masyarakat, Bina Lingkungan dan CSR yang berasal dari pihak eksternal;
   h. Hasil evaluasi penerapan program kemitraan, bina lingkungan dan CSR;
   i. Usulan rencana pelaksanaan Rapat Direksi yang dilaksanakan secara rutin ataupun insidental;
   j. Pengelolaan kegiatan protokoler Direksi Perusahaan;
   k. Usulan pengelolaan dan penggunaan anggaran biaya Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan;
   l. Mengelola tata usaha serta menyimpan dokumen perusahaan termasuk daftar pemegang saham, daftar khusus dan risalah rapat Direksi/rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan RUPS;
   m. Memutakhirkan materi informasi yang disajikan dalam website perusahaan maupun media cetak atau media resmi perusahaan untuk dikelola ketika ada pembaharuan;
   n. Pengelolaan kegiatan hubungan kelembagaan baik dengan Instansi terkait baik Pemerintah dan/atau non Pemerintah, Nasional, termasuk memfasilitasi komunikasi dengan calon mitra/investor;
3. Merekomendasikan usulan terkait:
   a. Media yang digunakan untuk menyebarkan informasi kepada pegawai perusahaan dan/atau pihak eksternal;
   b. Kegiatan yang akan dilakukan untuk meningkatkan corporate identity;

relations, implementation of corporate governance, and investor relations activities within the Company;

2. Conduct review and evaluation of:
   a. Proposed activity plans related to the dissemination of information to internal or external parties as well as improving corporate identity;
   b. Quarterly, Annual Management Report to be submitted to Board of Commissioners/Supervisory Board;
   c. Proposed corporate regulatory policies related to GCG along with other derivative policies such as the Board Manual, the Company's Code of Conduct, Gratification Guidelines and Whistleblowing System (WBS);
   d. Proposed GCG framework/control method, Board Manual, the Company's Code of Conduct, Gratification Guidelines and Whistleblowing System (WBS);
   e. Follow-up on the results of GCG assessment/ evaluation, Board Manual, the Company's Code of Conduct, Guidelines for Gratification and Whistleblowing System (WBS);
   f. Proposed plans for community service programs include Partnership, Community Development and SER;
   g. Evaluate the proposals for community service activities, Community Development and CSR from external parties;
   h. Evaluate the implementation results of partnership program, community development and SER;
   i. Propose plan for Board of Directors Meeting which is held routinely or incidentally;
   j. Management of the Company's Board of Directors protocol activities;
   k. Proposed management and use of the budget for Board of Directors and Board of Commissioners of the Company;
   l. Manage administration and store Company documents including shareholder register, special register and minutes of Board of Directors/Board of Commissioners/Supervisory Board meetings and GMS meetings;
   m. Updating the information material presented on the Company website as well as print media or official Company media to be managed when there is an update;
   n. Manage the institutional relations activities with related agencies, both Government and/or non-Government, National, including facilitating communication with potential partners/investors;
3. Recommend proposals related to:
   a. Media used to disseminate information to Company employees and/or external parties;
   b. Activities to be carried out to improve corporate identity;

c. Kebijakan *corporate identity* perusahaan;
d. Jenis kegiatan Program Pelayanan masyarakat, Bina Lingkungan dan CSR yang akan dilaksanakan;
e. Kebijakan perusahaan terkait dengan GCG dan peraturan turunannya seperti *Board Manual* (Tata Kelola Direksi dan Dewan Komisaris), dan Kode Etik Perusahaan, Pedoman Gratifikasi dan *Whistleblowing System* (WBS);
f. Tindak lanjut terhadap ketidakpatuhan atas Pedoman Gratifikasi dan *Whistleblowing System* (WBS) oleh Pegawai di lingkungan Perusahaan;
g. Agenda dan jadwal pelaksanaan rapat Direksi;
h. Rencana anggaran biaya Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan;
i. Jenis informasi yang dapat/tidak dapat disebarkan kepada pegawai internal perusahaan
j. Kebijakan keterbukaan informasi publik perusahaan;

4. Melakukan pengendalian terhadap:
a. Implementasi strategi dan/atau peraturan perusahaan terkait komunikasi perusahaan, penerapan GCG dan peraturan turunannya, Protokoler dan Tata Usaha Direksi, serta pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan;
b. Informasi untuk pegawai internal perusahaan dan pihak eksternal perusahaan;
c. Keberhasilan program Pelayanan Masyarakat, Bina Lingkungan, dan CSR yang dilakukan oleh Perusahaan;
d. Hasil evaluasi penerapan GCG dan peraturan turunannya seperti Board Manual (Tata Kelola Direksi dan Dewan Komisaris), dan Kode Etik Perusahaan, Pedoman Gratifikasi dan Whistleblowing System (WBS);
e. Keberjalanan Rapat Direksi secara rutin ataupun insidental

c. Company's corporate identity policy;
d. Types of Community Service Program, Community Development and CSR activities to be carried out;
e. Company policies related to GCG and its derivative regulations such as the Board Manual, the Company's Code of Conduct, Guidelines for Gratification and Whistleblowing System (WBS);

f. Follow up on non-compliance with Gratification Guidelines and Whistleblowing System (WBS) by Employees of the Company;
g. Agenda and schedule for Board of Directors meeting;
h. Budget plan for Board of Directors and Board of Commissioners of the Company;
i. Types of information that can/cannot be disseminated to internal Company employees;
j. Company's public information disclosure policy.

4. Exercise control on:
a. Implementation of corporate strategy and/or regulations related to corporate communication, implementation of GCG and its derivative regulations, Protocol and Administration of the Board of Directors, as well as implementation of partnership and community development programs;
b. Information for the Company's internal employees and external parties;
c. The success of the Community Service, Community Development, and CSR programs carried out by the Company;
d. The evaluation results of the implementation of GCG and its derivative regulations such as the Board Manual, the Company's Code of Conduct, Gratification Guidelines and Whistleblowing System (WBS);
e. Routine or incidental Board of Directors Meetings.

PROFIL SEKRETARIS PERUSAHAAN

CORPORATE SECRETARIAT PROFILE

Riwayat Pendidikan Educational Background	• ANT III : Nautica, Akademi Pelayaran Niaga – Semarang, Indonesia (2004) • ANT II: Nautica, Politeknik Ilmu Pelayaran – Semarang, Indonesia (2005) • ANT I: Nautica, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran – Jakarta, Indonesia (2008) • Master Mariner : Nautica, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran – Jakarta, Indonesia (2008) • ANT III: Nautica, Merchant Marine Academy – Semarang, Indonesia (2004) • ANT II: Nautica, Maritime Polytechnic – Semarang, Indonesia (2005) • ANT I: Nautica, Maritime College – Jakarta, Indonesia (2008) • Master Mariner: Nautica, Maritime College – Jakarta, Indonesia (2008)
Sertifikasi Certification	• Diklat ahli kepelabuhanan • Managment customer excellence • International seminar port security • Certified HR Director of Human Capital Management (BNSP) • Certified General Manager of Human Capital Management (BNS'P) • Certified Anti Fraud Governance (CAFG) • Port Expert Training • Customer Excellence Management • International Port Security Seminar • Certified HR Director of Human Capital Management (BNSP) • Certified General Manager of Human Capital Management (BNS'P) • Certified Anti-Fraud Governance (CAFG)
Pengalaman Kerja Work Experience	• President Director of PT Pelindo Jasa Maritim PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Surabaya (2017 – 2018) • President Director of PT Pelindo Daya Sejahtera PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Surabaya (2018 – 2019) • General Manager of Tanjung Intan Port PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Cilacap (2019 – 2020) • CEO of CentralJava PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Semarang (2020 – 2021) • CEO of Bali and Nusa Tenggara PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Bali (2021 – 2023) • CEO of Java PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Surabaya (2023 – 2024) • Executive Director Regional 3 PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Surabaya (2024 – 2025) • Group Head of Corporate Secretary PT Pelabuhan Indonesia (Persero),Jakarta (2025 – sekarang) • President Director of PT Pelindo Jasa Maritim, PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Surabaya (2017–2018) • President Director of PT Pelindo Daya Sejahtera, PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Surabaya (2018–2019) • General Manager of Tanjung Intan Port, PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Cilacap (2019–2020) • CEO of Central Java, PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Semarang (2020–2021) • CEO of Bali and Nusa Tenggara, PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Bali (2021–2023) • CEO of Java, PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Surabaya (2023–2024) • Executive Director of Regional 3, PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Surabaya (2024–2025) • Group Head of Corporate Secretary, PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Jakarta (2025–present)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis Appointment	Surat Keputusan Direksi Nomor KP.10.02/29/4/1/RKTK/UTMA/PLND-25 Board of Directors Decision No. KP.10.02/29/4/1/RKTK/UTMA/PLND-25

PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI SEKRETARIAT PERUSAHAAN

CORPORATE SECRETARIAT COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM

Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi/Pelatihan Types of Training and Competency Development/Training Materials	**Waktu Pelaksanaan** Date	**Penyelenggara** Organizer
Investing for Tomorrow "Mengatur Keuangan dan Investasi untuk Masa Depan yang Stabil" Investing for Tomorrow "Managing Finances and Investments for a Stable Future"	25 Februari 2025 February 25, 2025	PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia
Podcast Leadership Forum Vol. 6 "Felt Leadership - Peran Leader Dalam Perubahan Budaya" Leadership Forum Podcast Vol. 6 "Felt Leadership - The Role of Leaders in Cultural Change	6 Maret 2025 March 6, 2025	PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia
"Satu Tanah, Seribu Cerita : Perjalanan Menemukan Keindahan Indonesia" "One Land, a Thousand Stories: A Journey to Discover the Beauty of Indonesia"	17 Maret 2025 March 17, 2025	PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia

Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi/Pelatihan Types of Training and Competency Development/Training Materials	Waktu Pelaksanaan Date	Penyelenggara Organizer
Edisi Spesial : Ask the CEO Special Edition: Ask the CEO	15 April 2025 April 15, 2025	PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia
Ask the CEO Ask the CEO	2 Juli 2025 July 2, 2025	PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia
Spesial Hari Buruh Sedunia "Konstruksi Hukum Ketenagakerjaan dalam Kerangka Hubungan Industrial Pancasila yang Harmonis dan Berkeadilan" International Labor Day Special: "Constructing Labor Law within the Framework of Harmonious and Just Pancasila Industrial Relations"	2 Juli 2025 July 2, 2025	PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia
"Continous Learning" Pengelolaan Klinik K3 di Lingkungan PT Pelindo (Persero) "Continuous Learning": Occupational Health and Safety Clinic Management at PT Pelindo (Persero)	14 Agustus 2025 August 14, 2025	PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia
Accelerated Leadership Program for Pelabuhan Indonesia (ALPI) Cycle 2 – Graduation & Awarding Accelerated Leadership Program for Indonesian Ports (ALPI) Cycle 2 – Graduation & Awarding	18 Agustus 2025 August 18, 2025	PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia
Work – Life Synergy : Seni Peran Ganda Menjadi Orang Tua dan Pekerja Work-Life Synergy: The Art of Dual Roles as Parents and Workers	18 September 2025 September 18, 2025	PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia
Live Virtual : Re-Energizing Coaching Awareness : Maximizing Potential, Elevating Performance Live Virtual: Re-Energizing Coaching Awareness: Maximizing Potential, Elevating Performance	24 September 2025 September 24, 2025	PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia
Leadership Forum Volume VIII : Decision Making & Legal Risk : Antara Strategi, Regulasi dan Reputasi Leadership Forum Volume VIII: Decision-Making & Legal Risk: Between Strategy, Regulation, and Reputation	23 September 2025 September 23, 2025	PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia
Money Talk, No Drama : Cerdas Kelola Finansial di Era Society 5.0 Money Talk, No Drama: Smart Financial Management in the Era of Society 5.0	25 September 2025 September 25, 2025	PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia
"Continuous Learning" Transformasi Keselamatan Dengan Human Organizational Performance (HOP) "Continuous Learning": Safety Transformation with Human Organizational Performance (HOP)	15 Oktober 2025 October 15, 2025	PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia
Pelindo *ETalks* Vol.8	19 Oktober 2025 October 19, 2025	PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia
Engineering forum 2025: Infrastruktur Excellence untuk Efisiensi Logistik dan Pertumbuhan Ekonomi Engineering Forum 2025: Infrastructure Excellence for Logistics Efficiency and Economic Growth	10 November 2025 November 10, 2025	PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia
BREATH Session series 26 "Smart Financial 101 – Menjadi 'CFO' Cerdas bagi Keluarga" BREATH Session Series 26 "Smart Financial 101 – Becoming a Smart 'CFO' for Your Family"	8 Desember 2025 December 8, 2025	PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia
Online Self Learning: "Fundamentals of Break Bulk Operations Planning and Control" Online Self-Learning: "Fundamentals of Break Bulk Operations Planning and Control"	22 Desember 2025 December 22, 2025	PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia

PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIAT PERUSAHAAN TAHUN 2025

1. Bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan, Standar Prosedur Operasi (SPO), Program Kerja, dan *Key Performance Indicator* (KPI) sehubungan dengan tugas pokok dan tanggung jawabnya terkait komunikasi Perusahaan, manajemen kesekretariatan Direksi dan Dewan Komisaris, hubungan lembaga, dan tanggung jawab sosial;
2. Bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh publik secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
3. Bertanggung jawab untuk mengoordinasikan penyusunan Laporan Tahunan termasuk dalam

IMPLEMENTATION OF CORPORATE SECRETARIAT'S DUTIES IN 2025

1. Responsible for developing policies, Standard Operating Procedures (SOPs), Work Programs, and Key Performance Indicators (KPIs) related to the Company's core duties and responsibilities regarding corporate communications, secretarial management of Board of Directors and Board of Commissioners, institutional relations, and social responsibility;
2. Responsible for providing information needed by the public periodically and/or at any time upon request;
3. Responsible for coordinating the preparation of Annual Report, including participation in the Annual

mengikuti Annual Report Award (ARA) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Bertanggung jawab sebagai penghubung (liaison officer) dan pengelolaan hubungan lembaga dengan Instansi Pemerintah dan atau non Pemerintah, termasuk memfasilitasi komunikasi dengan calon mitra/investor;
5. Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan rapat Direksi, pengadaan bahan rapat Direksi dan penyusunan risalah rapat direksi;
6. Bertanggung jawab menatausahakan serta menyimpan dokumen yang meliputi: Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan risalah rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris dan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan;
7. Bertanggung jawab untuk melakukan program pengenalan Perusahaan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru diangkat;
8. Bertanggung jawab terhadap pembentukan citra Perusahaan baik internal ataupun eksternal;
9. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan program kegiatan tanggung jawab sosial, baik melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) maupun Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL)/ *Corporate Social responsibility* (CSR);
10. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan tata usaha Direksi dan Dewan Komisaris;
11. Bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi atas temuan dari Satuan Pengawasan Intern;
12. Melaksanakan pembinaan Pekerja di Group yang dipimpin sesuai kebijakan/pedoman di bidang Sumber Daya Manusia;
13. Bertanggung jawab untuk melakukan pelaporan kepada Direktur Utama atas pelaksanaan tugas pokok dan tanggung jawabnya.

SATUAN PENGAWASAN INTERN

STRUKTUR ORGANISASI PENGAWASAN INTERN

Report Award (ARA), in accordance with applicable regulations;
4. Responsible for acting as a liaison officer and managing the institution's relationships with government and/or non-government agencies, including facilitating communication with potential partners/investors;
5. Responsible for organizing Board of Directors meetings, procuring Board of Directors meeting materials, and preparing minutes of board meetings;
6. Responsible for administering and maintaining documents including: the Shareholder Register, the Special Register, and minutes of Board of Directors' meetings, Board of Commissioners' meetings, and minutes of the Company's General Meeting of Shareholders;
7. Responsible for conducting the Company's induction program for newly appointed members of Board of Directors and Board of Commissioners;
8. Responsible for building the Company's image both internally and externally;
9. Responsible for managing social responsibility programs, both through the Partnership and Community Development Program (PKBL) and Corporate Social Responsibility (CSR);
10. Responsible for managing the administration of Board of Directors and Board of Commissioners;
11. Responsible for following up on recommendations based on findings from Internal Audit Unit;
12. Implementing employee development within the Group under his/her leadership in accordance with Human Capital policies/guidelines;
13. Responsible for reporting to President Director on the implementation of his/her main duties and responsibilities.

INTERNAL AUDIT UNIT

INTERNAL AUDIT ORGANIZATIONAL STRUCTURE

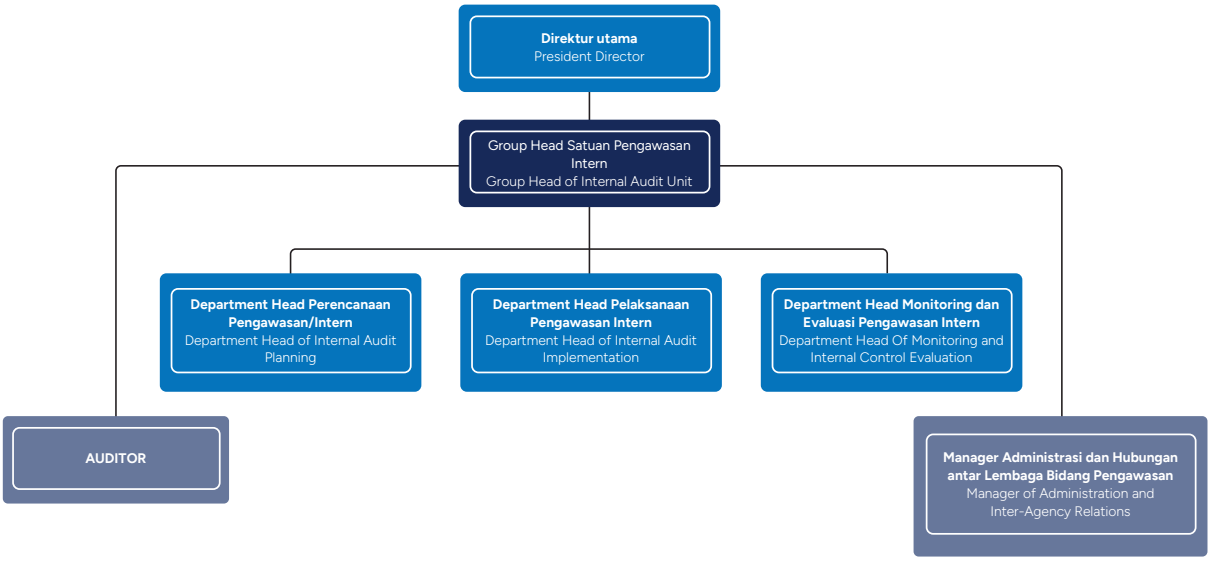

KEDUDUKAN SATUAN PENGAWASAN INTERN DALAM STRUKTUR ORGANISASI

Satuan Pengawasan Intern merupakan bagian dari manajemen yang independen dan dipimpin oleh Kepala Satuan Pengawasan Intern dan secara stuktur bertanggungjawab langsung pada Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Auditor Internal yang ditugaskan di Satuan Pengawasan Intern bertanggungjawab secara langsung kepada Kepala Satuan Pengawasan Intern.

INTERNAL AUDIT UNIT POSITION IN ORGANIZATION

Internal Audit Unit is part of independent management and is led by the Head of Internal Audit I Unit and is structurally responsible directly to the President Director of PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Internal Auditor assigned to Internal Audit Unit is directly responsible to the Head of Internal Audit Unit.

PROFIL KEPALA SATUAN PENGAWASAN INTERN

HEAD OF INTERNAL AUDIT UNIT PROFILE

Riwayat Pendidikan Educational Background	• Teknik Komputer, Politeknik ITB 1997 • Ekonomi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YASMI, 2006 • Computer Engineering, ITB Polytechnic, 1997 • Management Economics, YASMI School of Economics, 2006
Sertifikasi Certification	• Ahli Kepelabuhanan (2021) • *Port Expert (2021)* • Qualified Internal Auditor (QIA) • Qualified Risk Management Officer • Qualified Risk Management Professional (QRMP)
Pengalaman Kerja Work Experience	• Departement Head Perencanaan Pengawasan Intern Kantor Pusat (2023) • Departement Head Pengendalian Internal Supporting Kantor Pusat (2021) • SDVP Pelaksanaan Pengawasan Internal Kantor Pusat (2020) • Auditor Utama Pengawasan Internal Kantor Pusat (2019) • Senior Auditor Pengawasan Audit Internal Kantor Pusat (2019) • Manager Keuangan PT Energi Pelabuhan Indonesia (2014) • Officer PT Energi Pelabuhan Indonesia (2013) • Ass. Manager Sistem Informasi Cabang Pelabuhan Panjang (2010) • Ass. Manager Sistem Informasi (2009) • Head of Internal Audit Planning Department, Head Office (2023) • Head of Internal Control Support Department, Head Office (2021) • SDVP for Internal Audit Implementation, Head Office (2020) • Principal Auditor for Internal Audit, Head Office (2019) • Senior Auditor for Internal Audit Supervision, Head Office (2019) • Finance Manager of PT Energi Pelabuhan Indonesia (2014) • Officer of PT Energi Pelabuhan Indonesia (2013) • Assistant Manager of Information Systems for Panjang Port Branch (2010) • Assistant Manager of Information Systems (2009)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor KP.10.02/14/10/1/RKTK/UTMA/PLND-25 tanggal 14 Oktober 2025. Decree of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Number KP.10.02/14/10/1/RKTK/UTMA/PLND-25 dated October 14, 2025.

PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI SATUAN PENGAWASAN INTERN

Peningkatan kompetensi yang telah diikuti oleh Pegawai Satuan Pengawasan Intern selama tahun 2025 adalah sebagai berikut.

INTERNAL AUDIT UNIT COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM

Competency development that have been attended by Internal Audit Unit Employees during 2025 are as follows

No	NAMA PELATIHAN TRAINING NAME	JUMLAH PESERTA NUMBER OF PARTICIPANTS
1	Qualified Internal Auditor Tingkat Dasar Qualified Internal Auditor Basic Level	7
2	Qualified Internal Auditor Manajerial Qualified Internal Auditor Managerial	7
3	Pelatihan Audit Investigasi Investigative Audit Training	13

PIHAK YANG MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN KEPALA SATUAN PENGAWASAN INTERN

Kepala Satuan Pengawasan Intern diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris yang mendapatkan rekomendasi dari Komite Audit. Direktur Utama dapat memberhentikan Kepala Satuan Pengawasan Intern dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. Pengangkatan dan pemberhentian auditor internal dilaksanakan dengan mempertimbangkan pendapat dari Kepala Satuan Pengawasan Intern dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Perusahaan

APPOINTMENT AND DISMISSAL OF HEAD OF INTERNAL AUDIT UNIT

Head of Internal Audit Unit is appointed and dismissed by the President Director after obtaining approval from the Board of Commissioners and a recommendation from the Audit Committee. President Director may dismiss the Head of Internal Audit Unit with Board of Commissioners' approval. The appointment and dismissal of internal auditor is carried out by taking into account the opinion of Head of Internal Audit Unit and fulfilling the requirements set by the Company.

INTERNAL AUDIT CHARTER

Dalam mewujudkan tugasnya secara professional, kompeten, independen dan objektif, unit Satuan Pengawasan Intern mengacu pada Audit Charter Satuan Pengawasan Intern berdasarkan Nomor PW.01/17/1/1/PMPL/UTMA/PLND-22 tanggal 17 Januari 2022. Adapun isi Audit Charter Satuan Pengawasan Intern yaitu:

1. Pendahuluan
2. Visi, Misi, Tujuan, Tata Nilai dan Strategi
3. Ruang Lingkup
4. Fungsi, Tugas, Tanggung Jawab, Kewenangan, dan Akuntabilitas
5. Kode Etik
6. Pengorganisasian
7. Program Asurans dan Peningkatan Kualitas SPI
8. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
9. Pelaporan dan *Monitoring*
10. Komunikasi SPI dengan Pihak Lain
11. Hubungan Kerja dengan Pihak Lain
12. Evaluasi Piagam Satuan Pengawasan Intern
13. Penutup

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB INTERNAL AUDIT

1. Mengelola kegiatan pengawasan sesuai kode etik melalui jasa *assurance, probity* dan *consulting,* serta audit khusus dan audit objek tertentu lainnya atas perintah Direktur Utama di seluruh unit kerja di Perseroan, anak perusahaan dan afiliasinya.
2. Menguji, mengevaluasi, menilai dan melaporkan pelaksanaan pengawasan dan sistem manajemen risiko dan tata kelola perusahaan sesuai dengan standar audit.
3. Menyusun dan melaksanakan program kerja tahunan pengawasan intern berbasis risiko *(Risiko Based Audit*) dan disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris cq Komite Audit untuk mendapatkan pertimbangan dan saran.
4. Memberikan rekomendasi dan saran yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua unit kerja di lingkunan PT Pelabuhan Indonesia (Persero), serta melaporkan hasil pengawsan intern kepada *stakeholder* Satuan Pengawasan Intern.
5. Memonitor, mengevaluasi dan melaporkan hasil pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi hasil audit oleh auditor internal maupun eksternal dan hasilnya dilaporkan kepada Direktur Utama dan tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris cq Komite Audit.
6. Melakukan pendampingan kepada auditor eksternal dengan menyediakan informasi yang dibutuhkan dan menjadi fasilitator bagi auditor eksternal dalam berinteraksi dengan unit-unit kerja di Perusahaan.
7. Melakukan komunikasi, koordinasi dan pelaporan secara periodik atas kegiatan SPI kepada *stakeholder* Satuan Pengawasan Intern.
8. Mengembangkan teknologi yang terintegrasi untuk perencanaan, pelaksanaan, *monitoring,* dan pelaporan terhadap seluruh kegiatan di Satuan Pengawasan Intern.

INTERNAL AUDIT CHARTER

In carrying out its duties in a professional, competent, independent and objective manner, Internal Audit Unit refers to the Internal Audit Charter Number PW.01/17/1/1/PMPL/UTMA/PLND-22 dated January 17, 2022. The content of Internal Audit Charter is:

1. Introduction;
2. Vision, Mission, Objectives, Values and Strategy;
3. Scope;
4. Functions, Duties, Responsibilities, Authority, and Accountability;
5. Code of Conduct;
6. Organization;
7. SPI Assurance and Quality Improvement Program;
8. Annual Supervisory Work Program (PKPT);
9. Reporting and Monitoring;
10. SPI Communication with Other Parties;
11. Working Relationship with Other Parties;
12. Internal Audit Charter Evaluation; and
13. Closing.

INTERNAL AUDIT DUTIES AND RESPONSIBILITIES

1. Manage supervisory activities according to the code of conduct through assurance, probity and consulting services, as well as special audit and audit of certain other objects on orders from President Director in all work units in the Company, its subsidiaries and affiliates.
2. Test, evaluate, assess and report the implementation of supervision and risk management system and corporate governance in accordance with auditing standards.
3. Develop and implement an annual risk-based internal control work program (Risk Based Audit) and submit it to President Director and Board of Commissioners cq Audit Committee for consideration and advice.
4. Provide objective recommendations and suggestions on audited activities in all work units within PT Pelabuhan Indonesia (Persero), as well as report the results of internal audit to stakeholders of Internal Audit Unit.
5. Monitor, evaluate and report the results of monitoring on the follow-up to recommendations of audit results by internal and external auditors, and the results are reported to President Director and a copy is submitted to Board of Commissioners cq Audit Committee.
6. Provide assistance to external auditors by providing the required information and become a facilitator for external auditors in interacting with work units in the Company.
7. Communicating, coordinating and reporting periodically about SPI's activities to stakeholders of Internal Audit Unit.
8. Develop integrated technology for planning, implementation, monitoring, and reporting of all activities in Internal Audit Unit.

9. Menjaga profesionalitas auditor dengan memberikan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang cukup serta sertifikasi yang diperlukan.
10. Melakukan *assessment* untuk mengevaluasi mutu dari Satuan Pengawasan Intern secara periodik.
11. Melakukan pembinaan dan koordinasi dengan Satuan Pengawasan Intern di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) agar terciptanya sinergis atas kegiatan Satuan Pengawasan Inten.

KEWENANGAN INTERNAL AUDIT

1. Unit SPI memiliki akses tak terbatas ke seluruh auditee di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) terhadap semua fungsi, catatan, dokumen, properti, personil, laporan hasil audit yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaannya dan bertanggung jawab atas kerahasiaan catatan dan informasi tersebut.
2. Kepala SPI akan memastikan bahwa aktivitas audit internal bebas dari kondisi yang mengancam kemampuan audit internal untuk melakukan pekerjaannya dalam keadaan yang tidak memihak. Jika independensi atau objektivitas audit internal terganggu secara *Fact or Appearance,* Kepala SPI akan melaporkan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
3. Jika sebelumnya Kepala SPI memiliki peran dan/ atau tanggung jawab di luar audit internal, maka harus dibuat ketentuan untuk membatasi terjadinya penurunan independensi dan obyektivitas.
4. Menyusun dan merubah kebijakan pengawasan internal, antara lain pedoman, prosedur dan ketentuan lainnya terkait pekerjaan pengawasan internal di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) agar tercipta pengawasan yang terintegrasi.
5. Mengalokasikan sumber daya, menentukan frekuensi penugasan, menetapkan objek penugasan, menentukan ruang lingkup penugasan, serta menetapkan teknik penugasan yang diperlukan untuk mencapai tujuan penugasan.
6. Melakukan optimalisasi atas sumber daya yang digunakan dalam kegiatan pekerjaan/pemeriksaan antara lain berasal adri auditor di dalam ataupun di luar lingkungan Perusahaan.
7. Mengusulkan penugasan tambahan terkait *Assurance, probity, consulting*, audit khusus atau audit lainnya kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris cq. Komite Audit jika terdapat hal yang terindikasi akan mengganggu pencapaian tujuan perusahaan.
8. Melakukan peningkatan kualitas melalui penggunaan dan penerapan teknologi terintegrasi terkait pekerjaan pengawasan internal yang akan digunakan oleh Satuan Pengawasan Intern di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
9. Menentukan pola pembinaan, *monitoring* dan koordinasi kepada Satuan Pengawasan Intern di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) agar terciptanya pengawasan internal yang akan terintegrasi.
10. Memiliki akses untuk berkomunikasi secara langsung dengan Direktur Utama dan Dewan Komisaris cq Komite Audit.

9. Maintain the professionalism of the auditors by providing sufficient knowledge, skills and experience as well as the necessary certifications.
10. Conduct an assessment to evaluate the quality of Internal Audit Unit periodically.
11. Provide guidance and coordination with Internal Audit Unit within PT Pelabuhan Indonesia (Persero) in order to create synergies on the activities of Internal Audit Unit.

INTERNAL AUDIT AUTHORITIES

1. Internal Audit Unit has unlimited access to all auditees within PT Pelabuhan Indonesia (Persero) to all functions, records, documents, property, personnel, audit reports related to the implementation of their works and is responsible for the confidentiality of such records and information.
2. Head of Internal Audit will ensure that the internal audit activity is free from conditions that threaten the ability of internal audit to carry out its work in an impartial manner. If the independence or objectivity of internal audit is impaired by Fact or Appearance, Head of SPI will report to President Director and Board of Commissioners.
3. If previously the Head of Internal Audit had roles and/ or responsibilities other than internal audit, provisions must be made to limit the decrease in independence and objectivity.
4. Develop and change internal control policies, including guidelines, procedures and other provisions related to internal control work within PT Pelabuhan Indonesia (Persero) in order to create integrated supervision.
5. Allocating resources, determining the frequency of assignments, object of assignment, scope of assignment, and assignment techniques needed to achieve the assignment objectives.
6. Optimizing the resources used in work/examination activities, among others, from auditors within or outside the Company.
7. Propose additional assignments related to assurance, probity, consulting, special audit or other audits to President Director and Board of Commissioners cq. Audit Committee if there are issues that are indicated will interfere with the achievement of Company goals.
8. Improve quality through the use and application of integrated technology related to internal control work that will be used by Internal Audit Unit within PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
9. Determine the pattern of guidance, monitoring and coordination to Internal Audit Unit within PT Pelabuhan Indonesia (Persero) in order to create an integrated internal control.
10. Have access to communicate directly with President Director and Board of Commissioners cq Audit Committee.

11. Melarang perangkapan tugas dan jabatan auditor dan pelaksana yang duduk dalam Unit Audit Internal dari pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
12. Menolak terhadap penugasan di luar fungsi, tugas dan tanggung jawab Satuan Pengawasan Intern, yaitu:
    a. Pengambilan keputusan dan menjalankan fungsi operasional secara langsung atau tidak langsung.
    b. Memulai dan menyetujui transaksi yang tidak berkaitan dengan Satuan Pengawasan Intern.
    c. Memberikan perintah secara langsung kepada pekerja di luar personil Satuan Pengawasan Intern.
    d. Bertanggung jawab terhadap personil, departemen atau aktivitas yang menjadi objek pemeriksaan.
    e. Memberhentikan karyawan atau membubarkan departemen terkait dengan temuan audit.
    f. Menyusun dan menjalankan prosedur, sistem atau aktivitas operasional yang menjadi miliki obyek perusahaan.
    g. Melakukan pelaksanaan audit yang sedang ditangani oleh aparat hukum negara Republik Indonesian (RI).

11. Prohibit the dual duties and positions of auditors and implementers who serve in Internal Audit Unit from carrying out Company operational activities within PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
12. Refused to assignments other than the functions, duties and responsibilities of Internal Audit Unit, namely:
    a. Decision making and carrying out operational functions directly or indirectly.
    b. Initiate and approve transactions that are not related to Internal Audit Unit.
    c. Give orders directly to employees other than Internal Audit Unit personnel.
    d. Responsible for personnel, departments or activities that are the object of audit.
    e. Terminate employees or dissolve departments related to audit findings.
    f. Develop and carry out procedures, systems or operational activities that belong to the object of the Company.
    g. Carry out audit that is being handled by the state legal apparatus of the Republic of Indonesia (RI).

KOMPOSISI DAN SERTIFIKASI PROFESI PERSONIL SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

Sampai dengan Desember 2025 Unit SPI terdiri dari 1 (satu) orang Group Head, 3 (tiga) orang Departemen Head, 1 (satu) orang Manager, 4 (empat) orang Koordinator SPI, 45 (empat puluh lima) auditor serta 7 (tujuh) orang officer, dengan rincian sebagai berikut.

COMPOSITION AND PROFESSIONAL CERTIFICATION OF INTERNAL AUDIT UNIT PERSONNEL

As of December 2025, Internal Audit Unit consists of 1 (one) Group Head, 3 (three) Department Heads, 1 (one) Manager, 4 (four) Internal Audit Coordinators, 45 (forty-five) auditors and 7 (seven) officers, with the following details.

No	Nama Name	Jabatan Position	Sertifikasi Certification
1	Purbo Wijanarko	Group Head Satuan Pengawasan Intern Group Head of Internal Audit	QIA
2	Kresnajaya Prasetia Pancakarsa	Departemen Head Pelaksanaan Pengawasan Intern Department Head of Internal Audit Implementation	QIA
3	Tipung Muljoko	Departemen Head Perencanaan Pengawasan Intern Department Head of Internal Audit Planning	QIA
4	Yan Berhen Pangondian	Departemen Head Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Intern Department Head of Internal Audit Monitoring and Evaluation	QIA
5	Shaqina Nuruly	Plt. Manager Administrasi dan Hubungan Antar Lembaga Acting Manager of Administration and Inter-Agency Relations	QIA
6	Hanung Hamboro	Koordinator SPI Reg 2 SPI Reg 2 Coordinator	QIA
7	Agus Sulistyo	Koordinator SPI Reg 3 SPI Reg 3 Coordinator	QIA
8	Deni Rahayu Santoso	Koordinator SPI Reg 1 SPI Reg 1 Coordinator	QIA

No	Nama Name	Jabatan Position	Sertifikasi Certification
9	Hasrullah	Koordinator SPI Reg 4 SPI Reg 4 Coordinator	QIA
10	Sigit Poernomo	Principle Expert II Audit	QIA
11	Devi Saraswati	Principle Expert II Audit	QIA
12	Arief Adhi Wibowo	Principle Expert II Audit	
14	Yan Ekalaya Hamong Panambang	Principle Expert III Audit	QIA
17	Nur Indah Sari	Principle Expert III Audit	QIA
18	Yulias Caesar Sihombing	Principal Expert III Audit	QIA
19	Eko Henri Sufiawan	Principle Expert III Audit	QIA
20	M Aslam Fuadi	Principle Expert III Audit	QIA
21	Sugiarto	Senior Expert I Audit	QIA
23	Pramudito	Senior Expert I Audit	QIA
24	Rery Indra Kusuma	Senior Expert I Audit	QIA
25	Ibnu Sukarma	Senior Expert II Audit	QIA
27	Septa Andreas Sitepu	Senior Expert I Audit	QIA
28	Holly Tantyaka Y Keswara	Senior Expert II Audit	QIA
30	Fitriana	Senior Expert I Audit	
32	Fitri Herayati Nasution	Senior Expert III Audit	QIA
33	Rustini	Senior Expert III Audit	QIA
34	Darul Ikhran Angkasa B	Senior Expert III Audit	QIA
35	Ervina Lady M S	Auditor Pratama Primary Auditor	QIA
36	Adnan Lubis	Senior Expert III Audit	QIA
37	Sapri Ependi	Senior Expert III Audit	QIA
38	Rusli	Senior Expert III Audit	QIA
39	Jane Karpianasari	Senior Expert III Audit	
40	Deski Rizaldi	Expert I Audit	QIA
42	Jufrianto Siahaan	Senior Expert III Audit	QIA
43	Bara Wijianto	Senior Expert III Audit	QIA
44	Abd. Rachman	Expert I Audit	QIA
45	Herryansyah	Expert I Audit	QIA
46	Wimbi Perdana Putra	Expert I Audit	QIA
47	Indri Andriani	Expert I Audit	QIA
48	Mohamad Jamil	Expert I Audit	QIA
49	Henny Nur Aini	Expert II Audit	QIA
50	Kurniawan Haryo Yudanto	Expert III Audit	QIA

No	Nama Name	Jabatan Position	Sertifikasi Certification
51	Fransisca Dina K	Expert III Audit	QIA
52	Nur Utomo	Principle Expert II Audit	
53	Dodi Catur Fitrian	Principle Expert II Audit	
54	Hery Irwana	Senior Expert II Audit	
55	Fandy Mohammad Ayub	Senior Officer I Perencanaan Pengawasan Intern Senior Officer I - Internal Audit Planning	
56	Firman Adi Wicaksono	Senior Officer I Administrasi dan Hubungan Antar Lembaga Bidang Pengawasan Senior Officer I - Administration and Inter-Agency Relations, Supervision Sector	
57	RM Pramantha Taufik Bagus Amir	Senior Officer I Perencanaan Pengawasan Intern Senior Officer I - Internal Audit Planning	
58	Greasy Hutdiastuti	Senior Officer I Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Intern Senior Officer I - Internal Audit Monitoring and Evaluation	
59	Indra Abi Permana Kusuma	Senior Officer I Pelaksanaan Pengawasan Intern Senior Officer I - Internal Audit Implementation	
60	Ulfi Hardianti	Officer II Perencanaan Pengawasan Intern Officer II - Internal Audit Planning *Senior Officer II - Internal Audit Implementation*	
61	Samantha Lintang Dewi Titisari	Junior Officer I Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Intern Junior Officer I - Monitoring and Evaluation of Internal Supervision	

KODE ETIK AUDITOR

AUDITOR'S CODE OF CONDUCT

Prinsip Dasar Basic Principles	Aturan Prilaku Behavioral Guidance
Integritas Integritas Auditor Internal membentuk keyakinan dengan membangun kepercayaan untuk membuat pendapat (*judgment)* yang handal. Integrity Integrity of Internal auditors build confidence by building trust to generate reliable opinion (judgment)	• Bekerja dengan jujur, tekun dan bertanggungjawab. • Mematuhi hukum dan mengungkapkan informasi sebagaimana yang diatur oleh hukum dan profesi. • Tidak terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum atau kegiatan apapun yang mencemarkan profesi Auditor Internal atau Perusahaan. Menaruh hormat dan ikut berperan dalam pencapaian tujuan perusahaan yang etis dan tela sesuai dengan hukum (*legitimate*). • Work honestly, diligently and responsibly. • Comply with the law and disclose information as required by law and the profession. • Not involved in activities that violate the law or any activities that defame the profession of Internal Auditor or the Company. Respect and play a role in achieving the Company's goals that are ethical and in accordance with the law (legitimate).

Prinsip Dasar Basic Principles	**Aturan Prilaku** Behavioral Guidance
Objektivitas Auditor Internal menunjukkan objektivitas yang tinggi dalam memperoleh, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi tentang aktivitas atau proses yang sedang diuji. Auditor Internal melakukan penilaian secara seimbang (*balance)* atas segala hal yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau orang lain, dalam membuat pendapat (*judgement*). Objectivity Internal auditors demonstrate high objectivity in obtaining, evaluating and communicating information about the audited activity or process. Internal Auditors perform a balanced assessment and are not influenced by personal interests or others, in making an opinion (judgment).	• Tidak terlibat dalam aktivitas yang dapat mengurang atau dianggap mengurangi objektivitas Auditor Internal dalam melakukan penilaian, termasuk dalam aktivitas atau hubungan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. • Tidak menerima apapun yang dapat melemahkan atau dianggap melemahkan pertimbangan profesional. • Mengungkapkan semua fakta material yang diketahui, yang apabila tidak diungkapkan dapat menyebabkan distorsi pelaporan atas aktivitas yang diperiksa. • Not involved in activities that may reduce or be deemed to reduce the objectivity of Internal Auditor in conducting an assessment, including in activities or relationships that may cause a conflict of interest. • Do not accept anything that could undermine or be deemed to impair professional judgment. • Disclosing all known material facts, which if not disclosed can cause distortion of reporting on the activities being examined.
Kerahasiaan Auditor Internal menghormati nilai dan kepentingan atas informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang berwenang kecuali terdapat kewajiban hukum atau profesi untuk mengungkapkan informasi tersebut. Confidentiality Internal auditors respect the value and the importance of information received and do not disclose such information without proper authorization unless there is a legal or professional obligation to disclose the information.	• Bertindak hati-hati dalam menggunakan dan menjaga informasi yang diperoleh pada saat pelaksanaan tugas. • Tidak menggunakan informasi untuk kepentingan pribadi atau dengan cara apapun yang bertentangan dengan hukum atau mengganggu pencapaian sasaran perusahaan yang etis dan berlegitimasi. • Act with caution in using and safeguarding the information obtained during the execution of tasks. • Do not use information for personal gain or in any way that is against the law or interferes with the achievement of legitimate and ethical Company goals.
Kompetensi Auditor internal menerapkan pengetahuan kecakapan dan pengalaman yang diperlukan dalam memberikan jasa audit internal. Competence Internal auditors apply the knowledge, skills and experience required in providing internal audit services.	• Hanya terlibat dalam pemeriksaan apabila memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang diperlukan dalam pemeriksaan tersebut. • Melaksanakan fungsi pengawasan intern sekurang-kurangnya sesuai dengan persyaratan pengelolaan SPI. • Secara berkesinambungan meningkatkan keahlian serta efektivitas dan kualitas pekerjaan; bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan metode pelaksanaan pekerjaan dan standar profesional yang berlaku. • Only engage in audit if they have the knowledge, skills and experience required for the audit. • Carry out the internal control function at least in accordance with the requirements for IAU management. • Continuously improve skills as well as effectiveness and quality of work; act sincerely and in accordance with the method of carrying out the work and applicable professional standards.

Prinsip Dasar Basic Principles	Aturan Prilaku Behavioral Guidance
Perilaku Profesional Auditor Internal mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku dan menghindari perilaku apapun yang dapat mengurangi kepercayaan kepada profesi Professional Behavior Internal Auditors comply with applicable regulations and avoid any behavior that can reduce confidence in the profession.	• Melaksanakan fungsi pengawasan intern sesuai dengan prosedur, ketentuan dan peraturan yang berlaku. • Menghindari perilaku apapun yang dapat mengurangi kepercayaan kepada profesi auditor. • Dilarang menerima seiap pemberian dalam bentuk apapun dari pihak lain yang terkait dengan pekerjaannya baik dari dalam maupun dari luar perusahaan. • Harus mematuhi hukum dan menjunjung tinggi norma professional Auditor Internal. • Dilarang merangkap tugas dan jabatan dalam pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan, anak perusahaan maupun perusahaan terafiliasi bagi auditor dan pelaksana yang duduk dalam unit internal audit. • *Carry out the internal control function in accordance with applicable procedures, provisions and regulations.* • *Avoid any behavior that can reduce confidence in the auditor profession.* • *Forbidden to accept any gifts in any form from other parties related to their work, both inside and outside the Company.* • *Must comply with the law and uphold the professional norms of Internal Auditor.* • *Prohibited to hold concurrent duties and positions in the implementation of the Company's operational activities, subsidiaries and affiliated companies for auditors and executives who serve in the Internal Audit Unit.*

LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN KEGIATAN INTERNAL AUDIT TAHUN 2025

Berdasarkan PKPT 2025, Satuan Pengawasan Intern (SPI) menetapkan total rencana Mandays Tahun 2025 sebesar 10.871 Mandays. Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, realisasi Mandays mencapai 10.611 Mandays atau sebesar 97,61% dari rencana, dengan rincian 6.870 Mandays untuk kegiatan audit dan 3.741 Mandays untuk kegiatan non-audit.

Realisasi pelaksanaan audit sampai dengan Triwulan IV 2025 sebagai berikut:

1. Audit Tematik meliputi Bidang SDM, Operasional, IT, Manajemen Risiko, Pengembangan Bisnis dan Komersial.
2. Audit Kinerja meliputi Area Regional I - IV, Subholding dan Anak Perusahaan Non Cluster.

Realisasi tersebut menunjukkan komitmen SPI dalam memastikan pelaksanaan fungsi pengawasan berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

RAPAT BERSAMA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN/ATAU KOMITE AUDIT

1. Fungsi Audit Internal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya dapat berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
2. Komunikasi antara Kepala Satuan Pengawasan Internal dengan Direktur Utama dan Dewan Komisaris dapat dilakukan secara formal dan informal

3. Satuan Pengawasan Intern menyampaikan Laporan Hasil Audit secara periodik kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

BRIEF REPORT ON INTERNAL AUDIT ACTIVITIES IN 2025

Based on the 2025 Annual Internal Audit Work Plan (PKPT), the Internal Audit Unit (SPI) set a total planned Mandays of 10,871 Mandays for 2025. As of the fourth quarter of 2025, the realization reached 10,611 Mandays or 97.61% of the plan, consisting of 6,870 Mandays for audit activities and 3,741 Mandays for non-audit activities.

The realization of audit implementation up to the fourth quarter of 2025 is as follows:

1. Thematic Audits covering Human Capital, Operations, IT, Risk Management, Business Development, and Commercial areas.
2. Performance Audits covering Regional Areas I–IV, Subholding, and Non-Cluster Subsidiaries.

This realization reflects the commitment of Internal Audit Unit (SPI) in ensuring that supervisory functions are carried out in accordance with the established work plan.

JOINT MEETINGS OF BOARD OF DIRECTORS, BOARD OF COMMISSIONERS, AND/OR AUDIT COMMITTEE

1. In carrying out its duties, responsibilities, and authority, Internal Audit function may communicate and coordinate with the President Director and the Board of Commissioners.
2. Communication between the Head of Internal Audit Unit and the President Director and Board of Commissioners may be conducted both formally and informally.
3. Internal Audit Unit submits Audit Reports periodically to the President Director and the Board of Commissioners.

4. Secara berkala Satuan Pengawasan Intern dengan Direktur Utama dan/atau Dewan Komisaris melakukan rapat koordinasi melalui rapat *Board of Director* (BOD) dan/atau Rapat Komisaris, serta menyampaikan hasil *survey* kepuasan *Auditee*.

4. Periodically, Internal Audit Unit, together with the President Director and/or the Board of Commissioners, conducts coordination meetings through Board of Directors (BOD) meetings and/or Board of Commissioners meetings, and presents the results of auditee satisfaction surveys.

Selama tahun 2025, SPI telah melaksanakan rapat koordinasi bersama Direksi dan Komite Audit dengan rincian sebagai berikut.

During 2025, Internal Audit Unit (SPI) HAS conducted coordination meetings with Board of Directors and Audit Committee with the following details:

No	Tanggal Date	Agenda Agenda
1.	14 - 15 Januari 2025 January 14 - 15, 2025	Rapat Koordinasi Triwulan IV Tahun 2024 Komite Audit dengan Divisi Satuan Pengawasan Intern PT Pelabuhan Indonesia (Persero) *Fourth Quarter 2024 Coordination Meeting of Audit Committee with Internal Audit Division of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)*
2.	9-11 Juni 2025 June 9-11, 2025	Rapat Koordinasi Triwulan I Tahun 2025 Komite Audit dengan Divisi Satuan Pengawasan Intern PT Pelabuhan Indonesia (Persero) *First Quarter 2025 Coordination Meeting of Audit Committee with Internal Audit Division of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)*
3.	11 September 2025 September 11, 2025	Rapat Koordinasi Triwulan II Tahun 2025 Komite Audit dengan Divisi Satuan Pengawasan Intern PT Pelabuhan Indonesia (Persero) *Second Quarter 2025 Coordination Meeting of Audit Committee with Internal Audit Division of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)*
4.	18 Okt 2025 October 18, 2025	Rapat Koordinasi Triwulan III Tahun 2025 Komite Audit dengan Divisi Satuan Pengawasan Intern PT Pelabuhan Indonesia (Persero) *Third Quarter 2025 Coordination Meeting of Audit Committee with Internal Audit Division of PT Pelabuhan Indonesia (Persero)*

TEMUAN DAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT

AUDIT FINDINGS AND THE FOLLOW-UP

NO	Audit	Jumlah Rekomendasi Number of Recommendations	Per 31 Desember 2025				Progress %
			Status Tindaklanjut Follow-up status as of december 31, 2024				
			S	PANTAU MONITOR		TPT D	
				BS	BD		
1	SPI	4048	2975	149	924	0	73,49%
2	BPK	684	554	98	24	8	80,99%
3	KAP	50	50	48	2	0	96%

GROUP MANAJEMEN RISIKO, TATA KELOLA DAN KEPATUHAN

Group Manajemen Risiko, Tata Kelola dan Kepatuhan berfungsi untuk mengevaluasi, mengelola dan merekomendasikan penyusunan dan pengelolaan program kerja bidang manajemen risiko di lingkungan Perseroan untuk mendukung operasionalisasi dan pencapaian tujuan Perseroan untuk memastikan pencapaian visi dan misi Perseroan dan aspirasi pemegang saham.

RISK MANAGEMENT, GOVERNANCE AND COMPLIANCE GROUP

Risk Management Governance and Compliance Group has the functions to evaluate, manage and recommend the preparation and management of work programs in risk management and insurance management within the Company to support the operationalization and achievement of the Company's objectives to ensure the achievement of the Company's vision and mission and shareholders' aspirations.

STRUKTUR ORGANISASI GROUP MANAJEMEN RISIKO, TATA KELOLA DAN KEPATUHAN

RISK MANAGEMENT, GOVERNANCE AND COMPLIANCE GROUP ORGANIZATIONAL STRUCTURE

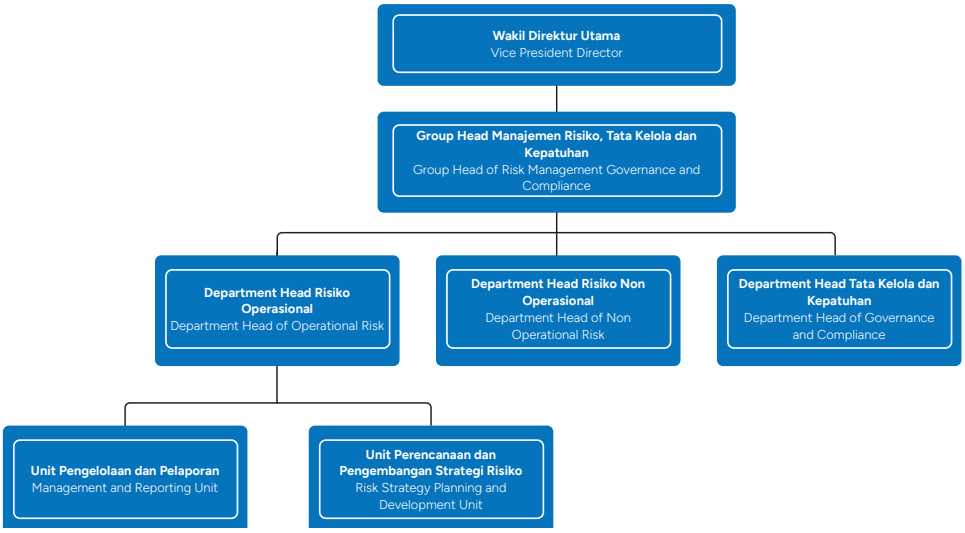

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB GROUP MANAJEMEN RISIKO, TATA KELOLA DAN KEPATUHAN

1. TUGAS UTAMA
   a. Mereviu, memberi masukan, dan mengesahkan usulan Kebijakan/Pedoman Penerapan Manajemen Risiko, Kebijakan Tata Kelola Perusahaan dan Kepatuhan, serta kebijakan/pedoman/peraturan turunannya untuk lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang meliputi:
      - Penerapan Manajemen Risiko;
      - *Good Corporate Governance* (GCG);
      - *Board Manual* (Tata Kelola Direksi dan Dewan Komisaris;
      - Budaya Tata Kelola dan Kepatuhan;
      - Benturan Kepentingan;
      - Gratifikasi;
      - Strategi Anti Fraud;
      - Kode Etik Bisnis;
      - *Whistleblowing System (WBS)*

   b. Merumuskan dan mengusulkan rencana dan strategi penerapan Manajemen Risiko serta Tata Kelola Perusahaan dan Kepatuhan untuk lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
   c. Mereviu, memberi masukan, dan memastikan Analisis Dampak Biaya (*Cost Impact Analysis*) terkait potensi risiko yang mungkin terjadi di lingkungan Pelabuhan Indonesia (Persero)
   d. Memastikan dan mendukung pengembangan peralatan (*Tools*) pengelolaan Manajemen Risiko di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
   e. Memfasilitasi dan mendukung pengembangan kapabilitas dan kapasitas Pekerja dalam hal pengelolaan Manajemen Risiko, Tata Kelola Perusahaan, dan Kepatuhan.
   f. Mereviu dan menyetujui penunjukkan pengelola Manajemen Risiko di lingkungan PT Pelabuhan

RISK MANAGEMENT, GOVERNANCE AND COMPLIANCE GROUP DUTIES AND RESPONSIBILITIES

1. MAIN DUTIES
   a. Review, provide input, and ratify the proposed Risk Management Implementation Policy/Guidelines, Corporate Governance and Compliance Policies, as well as policies/guidelines/derivative regulations within PT Pelabuhan Indonesia (Persero) which include:
      - Risk Management Implementation;
      - Good Corporate Governance (GCG);
      - Board Manual (Governance of Board of Directors and Board of Commissioners;
      - Governance and Compliance Culture;
      - Conflict of Interest;
      - Gratification;
      - Anti-fraud Strategy;
      - Code of Business Ethics;
      - Whistleblowing System (WBS)

   b. Formulate and propose plans and strategies for implementing Risk Management and Corporate Governance and Compliance within PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
   c. Review, provide input, and ensure Cost Impact Analysis related to potential risks that may occur within PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
   d. Ensure and support the development of Risk Management tools within PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
   e. Facilitate and support the development of capabilities and capacity of Employees in terms of managing Risk Management, Corporate Governance and Compliance.
   f. Review and approve the appointment of Risk Management managers within PT Pelabuhan

Indonesia (Persero) melalui peran *Risk Champion* dan *Risk Agent*

g. Mendukung dan memastikan pelaksanaan komunikasi dan sosialisasi terkait penerapan Manajemen Risiko, Tata Kelola Perusahaan, dan Kepatuhan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman pada ekosistem PT Pelabuhan Indonesia (Perseri) antara lain melalui:
   - Kampanye kepedulian Manajemen Risiko;
   - Kampanye kepedulian Tata Kelola Perusahaan dan Kepatuhan;
   - Portal pengetahuan Manajemen Risiko;
   - Portal pengetahuan Tata Kelola Perusahaan dan Kepatuhan;
   - Sosialisasi Kebijakan dan Proses Manajemen Risiko;
   - Sosialisasi Kebijakan dan Proses Tata Kelola Perusahaan dan Kepatuhan serta turunannya.

h. Mereviu dan memberikan arahan berdasarkan hasil konsolidasi penilaian pengelolaan Manajemen Risiko dan penerapan Tata Kelola Perusahaan dan Kepatuhan di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero)

i. Melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi terhadap:
   - Realisasi program kerja dan kesesuaian pengelolaan anggaran terkait penerapan Manajemen Risiko;
   - Realisasi program kerja dan kesesuaian pengelolaan anggaran terkait penerapan Tata Kelola Perusahaan dan Kepatuhan beserta peraturan turunannya;
   - Implementasi strategi dan/atau peraturan Perusahaan terkait bidan pengelolaan Manajemen Risiko;
   - Implementasi strategi dan/atau peraturan Perusahaan terkait penerapan Tata Kelola Perusahaan dan Kepatuhan beserta peraturan turunannya;
   - Tindak lanjut pengendalian risiko terhadap risiko yang signifikan secara periodik;
   - Realisasi capaian KRI dan penerapan EWS;
   - Kepatuhan atas tata kelola Perusahaan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku internal maupun eksternal Perusahaan.

j. Mengkoordinasikan pihak internal Perusahaan dalam rangka pelaksanaan proses pengelolaan Manajemen Risiko serta penerapan Tata Kelola Perusahaan dan Kepatuhan di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero)

k. Merekomendasikan, mereviu, memastikan, dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan kegiatan penerapan *Good Corporate Governance* di lingkungan perusahaan.

Indonesia (Persero) through the role of Risk Champion and Risk Agent.

g. Support and ensure the implementation of communication and socialization related to the implementation of Risk Management, Corporate Governance and Compliance to increase awareness and understanding in the ecosystem of PT Pelabuhan Indonesia (Persero), among others through:
   - Risk Management awareness campaign;
   - Corporate Governance and Compliance awareness campaign;
   - Risk Management knowledge portal;
   - Corporate Governance and Compliance knowledge portal;
   - Socialization of Risk Management Policies and Processes;
   - Socialization of Corporate Governance and Compliance Policies and Processes and their derivatives.

h. Review and provide direction based on the consolidated results of the Risk Management assessment and the implementation of Corporate Governance and Compliance at PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

i. Monitoring, controlling and evaluating:
   - Realization of work programs and suitability of budget management related to Risk Management implementation;
   - The realization of work programs and the suitability of budget management related to the implementation of Corporate Governance and Compliance along with its derivative regulations;
   - Implementation of the Company's strategy and/or regulations related to the midwife of Risk Management;
   - Implementation of the Company's strategy and/or regulations related to the implementation of Corporate Governance and Compliance along with its derivative regulations;
   - Risk control follow-up on significant risks periodically;
   - Realization of KRI achievements and implementation of EWS;
   - Compliance with corporate governance in accordance with applicable policies and regulations internal and external to the Company.

j. Coordinating the Company's internal parties in the context of implementing the Risk Management management process and implementing Corporate Governance and Compliance within PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

k. Recommend, review, ensure, and be responsible for the implementation of Good Corporate Governance implementation activities within the Company.

2. TUGAS UMUM
   a. *Planning, Budgeting* dan Pengelolaan Anggaran
      Mengarahkan dan mengkoordinasikan penyusunan dan monitoring Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) unit kerja/fungsi dan pengelolaan anggaran.
   b. Pengelolaan Pekerja
      - Mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan dan penilaian kinerja, serta pembimbingan pekerja di unit kerja/fungsi, termasuk pada perilaku indisipliner pekerja;
      - Mengarahkan dan mengkoordinasikan kebutuhan pelatihan dan pengembangan pekerja di unit kerja/fungsi
      - Busaya Organisasi
   c. *Quality Management* dan Prosedur (SOP)
      Mengarahkan dan mengkoordinasikan penyusunan, sosialisasi dan monitoring pelaksanaan kebijakan dan prosedur di unit kerja/fungsi serta melakukan dan memonitor kegiatan *improvemenet* dan *transfer Knowledge* di unit kerja/fungsi.
   d. *Health Safety* dan *Environment* (HSE)
      Mengarahkan, melakukan, memonitoring, dan mengevaluasi kegiatan implementasi budaya dan program HSE di unit kerja/fungsi.
   e. Pengembangan Sistem Information dan Communication Technology
      Mengarahkan dan mengkoordinasikan pengajuan usulan kebutuhan pengembangan layanan dan solusi ICT seta kegiatan User Acceptance Test (UAT)
   f. Rencana Procurement
      Mengarah dan mengkoordinasikan kegiatan pengadaan sesuai dengan kewenangan tertentu untuk kebutuhan unit kerja/fungsi
   g. Pengelolaan Risiko
      Menarahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan assessment GCG dan audit serta monitoring dan tindak lanjut hasil audit di unit kerja/fungsi.
   h. GCG dan Tindak Lanjut Hasil Audit
      Mengarahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan assesment GCG dan audit serta monitoring dan tindak lanjut hasil audit di unit kerja/funsi.
   i. Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)
      Mendukung implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. GENERAL DUTIES
   a. Planning, Budgeting and Budget Management
      Directing and coordinating the preparation and monitoring of Work and Budget Plans (RKA) of work/function units and budget management.
   b. Employee Management
      - Directing and coordinating performance planning and appraisal activities, as well as employee guidance in work/function units, including on employee disciplinary behavior;
      - Directing and coordinating the training and development needs of employees in the work/function unit.
      - Organizational Culture
   c. Quality Management and Procedures (SOP)
      Directing and coordinating the preparation, socialization and monitoring of the implementation of policies and procedures in work/function units as well as conducting and monitoring improvemenet activities and Knowledge transfer in work/function units.
   d. Health Safety and Environment (HSE)
      Directing, conducting, monitoring, and evaluating activities to implement HSE culture and programs in work/function units.
   e. Information and Communication Technology System Development
      Directing and coordinating the submission of proposals for the development needs of ICT services and solutions as well as User Acceptance Test (UAT) activities.
   f. Procurement Plan
      Directing and coordinating procurement activities in accordance with certain authorities for the needs of work/function units.
   g. Risk Management
      Directing and coordinating the implementation of GCG assessment and audit as well as monitoring and follow-up of audit results in work/function units.
   h. GCG and Follow-up of Audit Results
      Directing and coordinating the implementation of GCG assessment and audit as well as monitoring and follow-up of audit results in work/function units.
   i. Anti-Bribery Management System (ABMS)
      Support the implementation of Anti-Bribery Management System (ABMS) in accordance with applicable regulations.

PROFIL KEPALA GROUP MANAJEMEN RISIKO, TATA KELOLA DAN KEPATUHAN

GROUP HEAD OF RISK MANAGEMENT, GOVERNANCE AND COMPLIANCE PROFILE

Usman Saroni

Group Head Manajemen Risiko Tata Kelola dan Kepatuhan
Head of Risk Management, Governance and Compliance Group

Warga Negara Indonesia
Indonesian

Jakarta, Indonesia
Jakarta, Indonesia

Bandung, 13 Februari 1978/47 tahun per Desember 2025
Bandung, February 13, 1978/47 years old as of December 2025.

Riwayat Pendidikan Educational Background	• Port Management, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, Jakarta (1996) • Shipping and Logistic, World Maritime University, Swedia (2015) • Port Management, College of Shipping, Jakarta (1996); • Shipping and Logistics, World Maritime University, Sweden (2015).
Sertifikasi Certification	• Qualified Risk Management Professional (QRMP) • Certified Risk Governance Professional (CRGP) • Certified Corporate Risk Manager (CCRM) • Sertifikasi Skema Ahli Tata Kelola Risiko Terintegrasi (ATKRT-BNSP)-(CGRP-GIRMA) • *Integrated Risk Management Expert Scheme Certification (ATKRT-BNSP)-(CGRP-GIRMA)*
Pengalaman Kerja Work Experience	• Manager Ship Planning JICT (Jakarta International Container Terminal) (2009-2019) • Manager Yard Planning (Jakarta International Container Terminal) (2010-2011) • Manager Control Tower (Jakarta International Container Terminal) (2011-2012) • Senior Manager Petikemas IPC (2012-2014) • Vice President Quality Management IPC (2016-2019) • Vice President Pengelolaan Anak Perusahaan dan Cabang IPC (2019-2021) • Direktur Keuangan dan SDM PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (2021-2022) • Group Head Manajemen Risiko PT Pelabuhan Indonesia (2022 - Februari 2023) • Group Head Manajemen Risiko, Tata Kelola dan Kepatuhan PT Pelabuhan Indonesia (Maret 2023 - Sekarang) • Manager Ship Planning JICT (Jakarta Internasional Container Terminal) (2009-2019); • Manager Yard Planning (Jakarta Internasional Container Terminal) (2010-2011); • Manager Control Tower (Jakarta Internasional Container Terminal) (2011-2012); • Senior Manager Container IPC (2012-2014); • Vice President Quality Management IPC (2016-2019); • Vice President Management of IPC Subsidiaries and IPC Branches (2019-2021); • Director of Finance and Human Capital of PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (2021-2022); • Head of Risk Management Group of PT Pelabuhan Indonesia (2022 - February 2023); • Head of Risk Management, Governance and Compliance Group of PT Pelabuhan Indonesia (March 2023 - Present).
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis for Appointment	SK Direksi PT Pelabuhan Indonesia Nomor: KP.10/02/31/7/1/RKTK/UTMA/PLND-23 Tentang Alih Tugas/Jabatan Pekerja Di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Board of Directors Decree of PT Pelabuhan Indonesia No. 10/02/31/7/1/RKTK/UTMA/PLND-23 Concerning the Transfer of Duties/Job of Employees within PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

LAPORAN GRATIFIKASI TAHUN 2025 2025 GRATIFICATION REPORT

PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI GROUP MANAJEMEN RISIKO, TATA KELOLA DAN KEPATUHAN

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Tanggal Sertifikat/ Pelaksanaan
Boy Robyanto	Direktur Manajemen Risiko	Qualified Risk Governance Professional (QRGP)	19 September 2025
		Certified Anti Fraud Governance (CAFG)	14 November 2025
Usman Saroni	Group Head Manajemen Risiko Tata Kelola dan Kepatuhan	Certified Corporate Risk Manager (CCRM)	13 Januari 2025
		Qualified Chief Risk Officer (QCRO)	1 Maret 2023
		Risk Modelling dengan Metode Simulasi Monte Carlo	13 Januari 2025
Sumarman	Department Head Manajemen Risiko Operasional	Certified Governance Professional (CGP)	11 Desember 2025
		Qualified Risk Management Professional (QRMP)	16 Juni 2023
		Qualified Risk Governance Professional (QRGP)	5 Oktober 2022
		Qualified Chief Risk Officer (QCRO)	1 Maret 2023
		Certified Compliance Professional (CCP)	11 Desember 2025
		Pelatihan Risk Modelling Metode Monte Carlo	13 Januari 2025
		Internal Control Financial Reporting	17 Maret 2025
		Resilience Forum : Penyusunan Prosedur Penanganan Insiden	14-15 Mei 2025
		Partisipasi dan Peran Lini Kedua Dalam Implementasi ICOFR	19-20 Juni 2025
		GRC & BJR in UU BUMN 2025 Enabling Strategic Intelligence Through AI	22-23 Juli 2025
Muhammad Fatkhulloh	Department Head Manajemen Risiko Non Operasional	Qualified Risk Management Professional (QRMP)	27 Juni 2023
		Certified Compliance Professional (CCP)	11 Desember 2025

PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI GROUP MANAJEMEN RISIKO, TATA KELOLA DAN KEPATUHAN

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Tanggal Sertifikat/ Pelaksanaan
Yusuf Ferdian Umar	Department Head Tata Kelola dan Kepatuhan	Qualified Risk Management Officer(QRMO)	22 s.d 24 November 2023
		Certified Compliance Professional (CCP)	11 Desember 2025
		Certified Governance Professional (CGP)	29 November 2024
		Peluit Integritas KPK RI	21 s.d 23 Agustus 2023
		Lead Auditor ISO 9001:2015	27 September 2024
		Risk Modelling Monte Carlo	13 Januari 2025
		Pengelolaan Sistem Manajemen Terpadu	14 Maret 2025
		Resilience Forum : Penyusunan Prosedur Penanganan Insiden	15 Mei 2025
		E-Learning Peningkatan Pemahaman Gratifikasi Tahun 2025	26 Mei 2025
		Partisipan GRC & BJR in UU BUMN 2025 Enabling Strategic Intelligence Through AI	23 Juli 2025
		Lead Auditor ISO 37001:2025	26 Septermber 2025
Bahari Kusumawardani	Manager Pengelolaan dan Pelaporan	Certified Governance Professional (CGP)	29 November 2024
		Qualified Risk Management Professional (QRMP)	27 Juni 2023
		Qualified Risk Management Analyst (QRMA)	21 Juni 2022
		Qualified Risk Management Officer (QRMO)	8 Maret 2019
		Risk Modelling Monte Carlo	13 Januari 2025
		Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR)	19 Februari 2025
		Partisipasi dan Peran Lini Kedua Dalam Implementasi ICOFR	20 Juni 2025

PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI GROUP MANAJEMEN RISIKO, TATA KELOLA DAN KEPATUHAN

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Tanggal Sertifikat/ Pelaksanaan
Thaufik Samdani	Manager Perencanaan dan Pengembangan Strategi Risiko	Certified GRC Professional (CGRCP)	10 Oktober 2025
		Risk Modeling Monte Carlo	13 Januari 2025
		Peningkatan Pemahaman Gratifikasi	20 Mei 2025
		Global Trade Tension : Turning Crisis into Opportunity	28 Mei 2025
		Partisipasi dan Peran Lini Kedua Dalam Implementasi ICOFR	20 Juni 2025
Adrianus Stephen	Officer Pengelolaan dan Pelaporan	Qualified Risk Management Officer (QRMO)	21 November 2024
		Certified Governance Professional (CGP)	24 September 2025
		Pelatihan Risk Modelling dengan Metode Monte Carlo	13 Januari 2025
		Partisipasi dan Peran Lini Kedua Dalam Implementasi ICOFR	20 Juni 2025
		Peningkatan Pemahaman Gratifikasi	20 Mei 2025
Naomi Anastasya Tarigan	Senior Officer III Pengelolaan dan Pelaporan	Qualified Risk Management Officer (QRMO)	21 November 2024
		Certified Governance Professional (CGP)	24 September 2025
		Risk Modeling dengan Monte Carlo	13 Januari 2025
		Resilience Forum : Penyusunan Prosedur Penangana Insiden	15 Mei 2025
		Partisipasi dan Peran Lini Kedua Dalam Implementasi ICOFR	20 Juni 2025

PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI GROUP MANAJEMEN RISIKO, TATA KELOLA DAN KEPATUHAN

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Tanggal Sertifikat/ Pelaksanaan
Erika Widi Hapsari	Officer II Perencanaan dan Pengembangan Strategi Risiko	Qualified Risk Management Officer (QRMO)	20 November 2024
		Certified Governance Professional (CGP)	24 September 2025
		Pelatihan Risk Modelling dengan Metode Monte Carlo	13 Januari 2025
		Resilience Forum : Penyusunan Prosedur Penanganan Insiden	15 Mei 2025
		Partisipasi dan Peran Lini Kedua Dalam Implementasi ICOFR	20 Juni 2025
Arie Wahyu Wibisono	Junior Officer II Manajemen Risiko Non Operasional	Qualified Risk Management Professional (QRMP)	27 Juni 2023
		Qualified Risk Management Analyst (QRMA)	21 Juni 2022
		Qualified Risk Management Officer (QRMO)	8 Maret 2019
		BCM Series	
		Key Tips in Preparing for Disruption and Strengthening Business Resilience with Crisis Communication & Business Continuity Management	1 November 2024
		Risk Modelling Monte Carlo	13 Januari 2025
Ratna Juwita	Senior Officer III Manajemen Risiko Non Operasional	Certified Community Development Officer (CDO)	30-Apr-25
		Qualified Risk Management Officer (QRMO)	12 Agustus 2025

PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI GROUP MANAJEMEN RISIKO, TATA KELOLA DAN KEPATUHAN

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Tanggal Sertifikat/ Pelaksanaan
Ramadi Irwansyah	Junior Officer Tata Kelola dan Kepatuhan	Qualified Risk Management Officer (QRMO)	22 s.d 24 November 2023
		Certified Governance Professional (CGP)	29 November 2024
		Certified Compliance Professional (CCP)	11 Desember 2025
		Peluit Integritas KPK RI	21 s.d 23 Agustus 2025
		Pelatihan Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR)	17 Maret 2025
		Risk Modelling dengan Metode Monte Carlo	13 Januari 2025
		Internal Auditor Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016	15 s.d 17 September 2025
Amelia Puspitasari	Senior Officer III Tata Kelola dan Kepatuhan	Certified Governance Professional (CGP)	29 November 2024
		Qualified Risk Management Officer (QRMO)	22 Januari 2025
		Risk Modeling dengan Metode Monte Carlo	13 Januari 2025
		Workshop Penyusunan Laporan Keberlanjutan	22 Januari 2025
		Pengelolaan Sistem Manajemen Terpadu	14 Maret 2025
		Resilience Forum : Penyusunan Prosedur Penanganan Insiden	15 Mei 2025
		E Learning Peningkatan Pemahaman Gratifikasi Tahun 2025	26 Mei 2025
		Partisipasi dan Peran Lini Kedua Dalam Implementasi ICOFR	20 Juni 2025

SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO

Group Manajemen Risiko, Tata Kelola dan Kepatuhan berkolaborasi dengan unit kerja terkait, berkomitmen untuk memenuhi kualifikasi Organ Pengelola Risiko di lingkungan Pelindo Group dengan mendorong dan memonitor pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi sesuai persyaratan dalam petunjuk teknis. Beberapa program pelatihan dan sertifikasi yang telah dilaksanakan untuk Unit Manajemen Risiko di tahun 2025 diantaranya sebagai berikut:

RISK MANAGEMENT CERTIFICATION

The Risk Management, Governance and Compliance Group, in collaboration with related work units, is committed to meeting the qualifications of Risk Management Organs within Pelindo Group by encouraging and monitoring the implementation of training and certification according to the requirements in the technical guidelines. Some of training and certification programs that have been organized for Risk Management Unit in 2025 are as follows:

No.	Nama Pelatihan / Sertifikasi Name of Training/Certification	Jumlah Peserta Group MRTK Number of MRTK Participants
1	Certified Governance Professional (CGP)	5
2	Qualified Risk Management Officer (QRMO)	7
3	Qualified Risk Management Analyst (QRMA)	2
4	Qualified Risk Management Professional (QRMP)	2
5	Certified Corporate Risk Manager (CCRM)	1
6	Pelatihan BCM Series Executive & Management Education *BCM Series Executive & Management Education Training*	1
7	Pelatihan Risk Based Planning & Risk Modelling *Risk Based Planning & Risk Modeling Training*	10

PELAKSANAAN TUGAS GROUP MANAJEMEN RISIKO, TATA KELOLA DAN KEPATUHAN TAHUN 2025

1. Penguatan Fungsi dan Implementasi Manajemen Risiko di Seluruh Tingkatan Korporasi
2. Evaluasi dan Pengembangan aplikasi Pelindo Risk Management (PRiMa)
3. Review Kebijakan dan Prosedur terkait Manajemen Risiko
4. Penilaian *Risk Maturity Index* (RMI) Tahun 2025
5. Peningkatan budaya risiko
6. Pemenuhan Peraturan Menteri BUMN No 2/2023
7. Tindak Lanjut hasil Penetapan Klasifikasi Risiko Pelindo Group
8. Simplifikasi *monitoring* risiko investasi
9. Peningkatan pengembangan SDM dalam pembuatan RCSA terkait investasi, kerjasama usaha dan aksi korporasi
10. Implementasi *Business Continuity Management* Pelindo Group
11. Peningkatan fungsi manajemen risiko dalam perencanaan strategis dan operasional
12. Penerapan, *monitoring*, sosialisasi dan evaluasi atas Pelaksanaan Pengelolaan *Whistleblowing System*, Gratifikasi, benturan kepentingan dan Anti *Fraud*
13. Pelaksanaan *Assessment* Tata Kelola Pelindo
14. Optimalisasi Implementasi Tata Kelola Tahun 2025

RISK MANAGEMENT, GOVERNANCE AND COMPLIANCE GROUP DUTIES IMPLEMENTATION IN 2025

1. Strengthening the Function and Implementation of Risk Management at All Corporate Levels
2. Evaluation and Development of Pelindo Risk Management (PRiMa) Application
3. Review of Risk Management Policies and Procedures
4. Assessment of Risk Maturity Index (RMI) in 2025
5. Improving risk culture
6. Compliance with the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. 2/2023
7. Follow-up on the results of Pelindo Group's Risk Classification Determination
8. Simplifying investment risk monitoring
9. Improving human capital development in the preparation of RCSAs related to investments, business partnerships, and corporate actions
10. Implementation of Pelindo Group's Business Continuity Management
11. Improving the risk management function in strategic and operational planning
12. Implementation, monitoring, dissemination, and evaluation of the Implementation of Whistleblowing System, Gratification, Conflict of Interest, and Anti-Fraud Management
13. Implementation of Pelindo Governance Assessment
14. Optimization of Governance Implementation in 2025

15. Penerapan, *monitoring* dan evaluasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)
16. Pelaksanaan *internal control testing*
17. Implementasi tata kelola terintegrasi

KOMITE DI BAWAH DIREKSI

KOMITE PELINDO BERSIH

Dalam rangka pelaksanaan GCG di lingkungan Perseroan dan sejalan dengan program BUMN Bersih yang dicanangkan oleh Kementerian BUMN, maka Perseroan menerapkan *whistleblowing system*. Dalam rangka efektivitas penerapan whistleblowing system Direksi membentuk Komite Pelindo Bersih. Pada tahun 2023 terdapat perubahan struktur organisasi, sehingga dilakukan pembaharuan Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pelindo Bersih, sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. SK.01.01/25/7/1/TKPT/ UTMA/PLND-23 tanggal 25 Juli 2023 tentang Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pelindo Bersih Dalam Pelaksanaan *Whistleblowing System* PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

PEDOMAN KERJA KOMITE PELINDO BERSIH

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/ MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Signifikan Badan Usaha Milik Negara, maka pada tahun 2023 perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan tentang Penerapan Pedoman *Whistleblowing System* (WBS) di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Pedoman kerja Komite Pelindo Bersih mengacu pada Peraturan Direksi Nomor SK.01.01/13/12/3/TKPT/UTMA/ PLND-23 tanggal 13 Desember 2023 tentang Pedoman Whistleblowing System PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan Surat Keputusan Direksi Nomor SK.01.01/25/7/1/ TKPT/UTMA/PLND-23 tanggal 25 Juli 2023 tentang Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pelindo Bersih Dalam Pelaksanaan *Whistleblowing System* PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE PELINDO BERSIH

1. Membahas dan memberikan rekomendasi untuk tindak lanjut atas laporan dugaan pelanggaran yang masuk dalam saluran *whistleblowing system* dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak penerimaan pengaduan.
2. Rekomendasi yang diberikan berupa kesimpulan hasil pembahasan laporan *whistleblowing system* oleh komite (laporan dapat ditindaklanjuti atau tidak dan membutuhkan investigasi lebih lanjut atau tidak) dan rekomendasi urgensi laporannya.
3. Mengoordinasikan tindak lanjut dan investigasi laporan yang masuk selama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah laporan diterima dibantu oleh Investigator, yaitu Group Head Satuan Pengawasan Intern dan Group Head Layanan SDM serta PIC WBS dari Regional,

15. Implementation, monitoring, and evaluation of the Anti-Bribery Management System (SMAP)
16. Implementation of internal control testing
17. Implementation of integrated governance

COMMITTEE UNDER BOARD OF DIRECTORS

PELINDO BERSIH COMMITTEE (CLEAN PELINDO COMMITTEE)

In order to implement GCG within the Company and in line with the BUMN Bersih program launched by the Ministry of SOEs, the Company applies a whistleblowing system. To effectively carry out the whistleblowing system, Board of Directors established Pelindo Bersih Committee. In 2023, there were changes in the organizational structure, hence the Duties and Responsibilities of Pelindo Bersih Committee were updated, in accordance with the Decree of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. SK.01.01/25/7/1/TKPT/ UTMA/PLND-23 dated July 25, 2023 concerning the Duties and Responsibilities of Pelindo Bersih Committee in Implementing the Whistleblowing System of PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

PELINDO BERSIH COMMITTEE WORK GUIDELINES

Based on the SOE Minister Regulation Number PER-02/MBU/03/2023 dated March 24, 2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Activities of State-Owned Enterprises, it is necessary to make changes to the Regulation on the Implementation of Whistleblowing System (WBS) Guidelines within PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Pelindo Bersih Committee work guidelines refer to the Board of Directors Regulation Number SK.01.01/13/12/3/TKPT/ UTMA/PLND-23 dated December 13, 2023 concerning the Whistleblowing System Guidelines of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) and the Board of Directors Decree Number SK.01.01/25/7/1/TKPT/UTMA/PLND-23 dated July 25, 2023 concerning Duties and Responsibilities of Pelindo Bersih Committee in Implementing the Whistleblowing System in PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

PELINDO BERSIH COMMITTEE DUTIES AND RESPONSIBILITIES

1. Discuss and provide recommendations for follow-up on reports of alleged violations that enter the whistleblowing system channel no later than 14 (fourteen) working days from the receipt of the complaint.
2. Recommendations given in the form of conclusions on discussion results of the whistleblowing system report by the committee (the report can be followed up or not and requires further investigation or not) and recommendations on the urgency of the report.
3. Coordinate the follow-up and investigation of incoming reports for 30 (thirty) working days after the report is received assisted by the Investigator, which is the Group Head of Internal Audit Unit, Group Head of HC Services and the WBS PIC from Regional, Subholding

Subholding dan Anak Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

4. Melakukan investigasi dan membuat kesimpulan, saran serta rekomendasi atas hasil pemeriksaan/ permintaan yang dikoordinasikan oleh Group Head Satuan Pengawasan Intern dan meminta keterangan ahli apabila diperlukan.
5. Memonitoring tindak lanjut/putusan atas laporan yang masuk jika terbukti terjadi pelanggaran, untuk tindak lanjut/putusan kepada internal dikoordinasikan oleh Group Head Layanan SDM.
6. Melakukan rapat internal minimal 1 (satu) kali dalam setiap 3 (tiga) bulan dan/atau setiap terdapat laporan dugaan pelanggaran melalui WBS.
7. Melakukan pengawasan terhadap independensi dan efektivitas pelaksanaan WBS Perseroan.
8. Melakukan *benchmarking* pada perusahaan lain untuk melihat perkembangan skema WBS.
9. Setiap anggota Komite wajib menandatangani pakta integritas agar selalu menjaga kerahasiaan dalam menjalankan tugasnya.
10. Membuat dan me*review* kebijakan dan sistem prosedur operasi (SOP) terkait WBS dibantu oleh pihak independen yang ditunjuk perusahaan.
11. Melakukan sosialisasi kepada insan Pelindo dan stakeholder terkait penggunaan saluran WBS.
12. Membuat laporan secara berkala setiap semester kepada Direktur Utama dan Komisaris Utama atas pelaksanaan WBS.
13. Perusahaan dapat menunjuk pihak eksternal/KAP, atau pihak eksternal lainnya untuk menangani pengelolaan WBS di Perseroan.

and Subsidiaries of PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

4. Conduct investigations and make conclusions, suggestions and recommendations on the results of examinations/requests coordinated by Group Head of Internal Audit Unit and request expert testimony if necessary.
5. Monitoring the follow-up/decision on the incoming report if a violation is proven, for internal follow-up/decision coordinated by the Group Head of HC Services.
6. Conduct internal meetings at least 1 (one) time in every 3 (three) months and/or every time there is a report of alleged violation through WBS.
7. Supervise the independence and effectiveness of the Company's WBS implementation.
8. Conduct benchmarking with other companies to see the development of the WBS scheme.
9. Each Committee member is required to sign an integrity pact to always maintain confidentiality in carrying out their duties.
10. Create and review policies and system operating procedures (SOP) related to WBS assisted by an independent party appointed by the Company.
11. Conduct socialization to Pelindo People and stakeholders regarding the use of WBS channel.
12. Make periodic reports every semester to President Director and President Commissioner on the implementation of WBS.
13. The Company may appoint external parties/KAP, or other external parties to handle WBS management in the Company.

STRUKTUR KEANGGOTAAN KOMITE PELINDO BERSIH

PELINDO BERSIH COMMITTEE MEMBERSHIP STRUCTURE

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Group Head Manajemen Risiko, Tata Kelola, dan Kepatuhan Group Head of Risk Management, Governance and Compliance	Ketua (Sekaligus Anggota) Chairman (Concurrent Member)
2	Group Head Satuan Pengawasan Internal Group Head of Internal Audit	Wakil Ketua (Sekaligus Anggota) Vice Chairman (Concurrent Member)
3	Department Head Tata Kelola dan Kepatuhan Department Head of Governance and Compliance	Sekretaris (Sekaligus Anggota) Secretary (Concurrent Member)
4	Group Head Sekretariat Perusahaan Group Head Corporate Secretariat	Anggota Member
5	Group Head Hukum Group Head of Legal	Anggota Member
6	Group Head Layanan SDM Group Head of HC Services	Anggota Member
7	Group Head Pelayanan Terminal Group Head of Terminal Services	Anggota Member

PROFIL KOMITE PELINDO BERSIH

PELINDO BERSIH COMMITTEE PROFILE

Usman Saroni
Ketua merangkap Anggota/ Group Head Manajemen Risiko Tata Kelola dan Kepatuhan
Chairman Concurrently Member/Group Head of Risk Management, Governance and Compliance

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Kepala Group Head Manajemen Risiko Tata Kelola dan Kepatuhan dalam Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini

The profile can be seen in the Group Head of Risk Management, Governance and Compliance Profile section in the Corporate Governance Chapter in this Annual Report.

Purbo Wijanarko
Wakil Ketua merangkap Anggota / Group Head Satuan Pengendalian Internal
Vice Chairman concurrently Member/Group Head of Internal Audit Unit

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Kepala Group Satuan Pengawasan Intern dalam Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini

The profile can be seen in the Group Head of Internal Audit Unit Profile section in the Corporate Governance Chapter in this Annual Report.

Yusuf Ferdian Umar
Sekretaris/Department Head Tata Kelola dan Kepatuhan
Secretary/Department Head of Governance and Compliance

Warga Negara Indonesia. Lahir di Jakarta, 12 Februari 1981. Beliau lulusan Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi dari Universitas Persada Indonesia-YAI (2004), Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen Keuangan dari Universitas Indonesia (2005), Akuntan dari Program Profesi Akuntansi Universitas Indonesia (2008), Magister Manajemen (MBA) Konsentrasi Keuangan dari Universitas Gadjah Mada (2011), Magister Sains Manajemen (MSC) Jurusan International Logistics and Supply Chain Management dari Plymouth University, Inggris (2014). Beliau pernah menjabat sebagai Manajer Komersial dan Pengembangan Bisnis PT Indonesia Kendaraan Terminal (Oktober 2015-April 2017), Senior Internal Auditor PT Indonesia Kendaraan Terminal, Tbk (April 2017-November 2019), Analyst Wakil Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (November 2019 – Oktober 2021), Project Manager Group Manajemen Integrasi / Transformasi Korporasi dan Manajemen Program PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (Oktober 2021 - Juni 2023), Department Head Tata kelola dan Kepatuhan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (Juni 2023 – Sekarang).

Indonesian. Born in Jakarta, February 12, 1981. Graduated with a Bachelor of Economics majoring in Accounting from Persada Indonesia-YAI University (2004), Bachelor of Economics majoring in Financial Management from University of Indonesia (2005), Accountant from Accounting Professional Program of University of Indonesia (2008), Master of Management (MBA) majoring in Wealth Management from Gadjah Mada University (2011), Master of Science in Management (MSC) majoring in International Logistics and Supply Chain Management from University (2014). Has served as Commercial and Business Development Manager of PT Indonesia Kendaraan Terminal (October 2015-April 2017), Senior Internal Auditor of PT Indonesia Kendaraan Terminal, Tbk (April 2017-November 2019), Analyst of Deputy President Director of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (November 2019-October 2021), Project Manager of Integration Management Group/ Corporate Transformation and Program Management of PT Pelabuhan Department Head of Governance and Compliance of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (June 2023-Present).

Ali Sodikin
Anggota / Group Head Sekretaris Perusahaan
Member / Group Head of Corporate Secretary

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Kepala Group Sekretaris Perusahaan dalam Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

The profile can be seen in the Group Head of Corporate Secretary Profile section in the Corporate Governance Chapter of this Annual Report.

Akhirman
Anggota/Group Head Hukum
Member / Group Head of Legal

Warga Negara Indonesia. Lahir di Soppeng, 08 September 1979. Beliau lulusan Sarjana Hukum Tata Negara dari Universitas Hasanuddin (2003), Magister Hukum Perdata dari Universitas Hasanuddin (2016), Doktor Hukum Tata Negara Universitas Hasanuddin (2023). Beliau Pernah menjabat sebagai Direktur Operasi dan Komersial PT Intan Sejahtera Utama (2021-2023), Staf Utama Direktorat Keuangan dan SDM pada Subholding Pelindo Solusi Logistik (2024), Direktur Utama PT Prima Pengembangan Kawasan (2024).

Indonesian citizen. Born in Soppeng, September 8, 1979. Graduated with a Bachelor of Constitutional Law from Hasanuddin University (2003), a Master of Civil Law from Hasanuddin University (2016), and a Doctorate in Constitutional Law from Hasanuddin University (2023). Previously served as Director of Operations and Commercial of PT Intan Sejahtera Utama (2021-2023), Main Staff of the Finance and HC Directorate at Pelindo Solusi Logistik Subholding (2024), and President Director of PT Prima Pembangunan Kawasan (2024).

Basuki Soleh
Anggota/Group Head Layanan SDM
Member/Group Head of HC Services

Warga Negara Indonesia. Beliau lulusan Sarjana Manajemen SDM dari Universitas Medan Area (1994) dan Magister Manajemen Operasi dari University Sumatera Utara (2004). Beliau Pernah menjabat sebagai Group Head Pengadaan (2022-2023), Group Head Manajemen Aset (2023-2025), Group Head Layanan SDM (Oktober 2025-Sekarang).

Indonesian citizen. Holds a Bachelor of Human Resource Management degree from Medan Area University (1994) and a Master of Operations Management degree from the University of North Sumatra (2004). Previously served as Group Head of Procurement (2022-2023), Group Head of Asset Management (2023-2025), and Group Head of HR Services (October 2025-Present).

Andi Hamdani
Anggota/Group Head Pelayanan Terminal
Member/Group Head of Terminal Services

Warga Negara Indonesia. Lahir di Serang, 22 September 1970. Beliau lulusan Sarjana Ekonomi Manajemen Universitas Terbuka (2002) dan Magister Shipping and Transportation Netherland Maritime University (2014). Beliau Pernah menjabat sebagai Direktur Komersial PT MTI (2019-2021), Direktur Operasi dan Teknik PT Indonesia Kendaraan Terminal, Tbk (2021-2023).

Indonesian citizen. Born in Serang, September 22, 1970. Graduated with a Bachelor of Economics in Management from Universitas Terbuka (2002) and a Master of Shipping and Transportation from Netherland Maritime University (2014). Previously served as Commercial Director of PT MTI (2019-2021), and Director of Operations and Engineering at PT Indonesia Kendaraan Terminal, Tbk (2021-2023).

INDEPENDENSI KOMITE PELINDO BERSIH

Seluruh anggota Komite tidak memiliki afiliasi dengan Direktur lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun pekerja dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan Perseroan.

PELINDO BERSIH COMMITTEE INDEPENDENCE

All members of the Committee have no affiliation with other Directors, Commissioners or Controlling Shareholders, are not shareholders of a Company that can affect their ability to act independently, or are a Commissioner, Director or employee of a Company that has affiliations or conducts business with the Company.

RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE PELINDO BERSIH

Komite melakukan rapat internal minimal 1 (satu) kali dalam setiap 3 (tiga) bulan dan/atau setiap terdapat laporan dugaan pelanggaran melalui WBS. Adapun pelaksanaan rapat dan pelaksanaan tugas Komite Pelindo Bersih selama tahun 2025 yaitu:

PELINDO BERSIH COMMITTEE MEETINGS AND DUTIES IMPLEMENTATION

The Committee conducts internal meetings at least 1 (once) every 3 (three) months and/or whenever there is a report of alleged violations through the WBS. The implementation of Pelindo Bersih Committee meetings and duties during 2025, included:

No	Tanggal Date	Agenda Agenda
1	09 Mei 2025 May 9, 2025	Rapat Koordinasi *Whistleblowing System* PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Triwulan I tahun 2025 PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Whistleblowing System Coordination Meeting, Quarter I, 2025
2	09 Januari 2026 January 9, 2026	Rapat Koordinasi *Whistleblowing System* PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Triwulan II, III dan IV tahun 2025 PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Whistleblowing System Coordination Meeting, Quarter II, III, and IV, 2025

KOMITE TATA KELOLA, MANAJEMEN RISIKO DAN KEPATUHAN

Dalam rangka mendukung peningkatan kinerja dan transformasi bisnis yang memperhatikan aspek tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko tata kelola dan kepatuhan dalam proses pengambilan keputusan Perusahaan terkait dengan pengelolaan investasi, kebijakan strategis operasional Perseroan dan pengendalian kegiatan strategis usaha grup Pelindo, maka Direksi membentuk Komite Tata Kelola, Manajemen risiko dan Kepatuhan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dibentuk berdasarkan Keputusan No. PW.05.02/24/11/2/MRNO/UTMA/PLND-23 tanggal 24 November 2023.

PEDOMAN KERJA KOMITE TATA KELOLA, MANAJEMEN RISIKO DAN KEPATUHAN

Pedoman kerja Komite Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan mengacu pada Surat Keputusan Direksi Nomor No PW.05.02/24/11/2/MRNO/UTMA/PLND-23 tanggal 24 November 2023 tentang Pembentukan Komite dan Penetapan Piagam (Charter) Komite Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan PT Pelabuhan Indonesia (Persero)

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE TATA KELOLA, MANAJEMEN RISIKO DAN KEPATUHAN

1. Melaksanakan tugasnya secara kolektif dalam membantu Direksi.
2. Memastikan kesesuaian dan kelengkapan dokumen tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan atas usulan program investasi Perseroan, kebijakan strategis operasional dan pengendalian kegiatan strategis usaha *Group* Perseroan.
3. Memberikan opini atas kelengkapan dan kesesuaian usulan program investasi perusahaan, kebijakan strategis operasional dan pengendalian kegiatan strategis usaha *Group* Perseroan terkait dengan tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan.
4. Harus bersikap independen dan obyektif serta profesional dalam melaksanakan tugasnya maupun dalam laporan dan bertanggung jawab langsung kepada Direksi.
5. Melakukan identifikasi terhadap hal-hal yang memerlukan perhatian dari Direksi sebelum keputusan/kebijakan strategis akan ditetapkan oleh Perusahaan.
6. Ruang lingkup fungsi Komite GRC, yaitu untuk investasi / Proyek Strategis Perusahaan yang memenuhi minimal salah satu dari kriteria sebagai berikut:
   a. Dikategorikan merupakan investasi strategis karena merupakan proyek investasi lebih besar dari Rp 100 Miliar;
   b. Proyek investasi yang melibatkan koordinasi dan kerjasama dengan banyak instansi Pemerintah;
   c. Proyek investasi yang dipertimbangkan dan ditetapkan oleh Manajemen Perusahaan (Direksi) sebagai Investasi Strategis;

GOVERNANCE, RISK MANAGEMENT AND COMPLIANCE COMMITTEE

In order to support the performance improvement and business transformation that takes into account the aspects of good corporate governance, risk management and compliance in the Company's decision-making process related to investment management, the Company's operational strategic policies and control of Pelindo group's strategic business activities, Board of Directors formed PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Governance, Risk Management and Compliance Committee based on Decree No. PW.05.02/24/11/2/MRNO/UTMA/PLND23 dated November 24, 2023.

GOVERNANCE, RISK MANAGEMENT AND COMPLIANCE COMMITTEE WORK GUIDELINES

Governance, Risk Management and Compliance Committee work guidelines refer to the Board of Directors Decree No. PW.05.02/24/11/2/MRNO/UTMA/PLND-23 dated November 24, 2023 concerning the Establishment of Committees and Determination of the Charter of Governance, Risk Management and Compliance Committee of PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

GOVERNANCE, RISK MANAGEMENT AND COMPLIANCE COMMITTEE DUTIES AND RESPONSIBILITIES

1. Perform its duties collectively in assisting Board of Directors.
2. Ensure the suitability and completeness of governance, risk management and compliance documents on the Company's proposed investment program, strategic operational policies and control of the Company's Group business strategic activities.
3. Provide an opinion on the completeness and suitability of the Company's proposed investment program, operational strategic policies and control of the Group's strategic business activities related to governance, risk management and compliance with laws and regulations.
4. Must be independent and objective as well as professional in carrying out its duties as well as in reports and is directly responsible to Board of Directors.
5. Identify matters that require attention from Board of Directors before strategic decisions/policies will be established by the Company.
6. The scope of GRC Committee's functions is for the Company's investments/strategic projects that meet at least one of the following criteria:
   a. Categorized as strategic investments because the investment projects exceeding Rp100 billion;
   b. Investment projects involving coordination and collaboration with multiple government agencies;
   c. Investment projects considered and determined by the Company's Management (Board of Directors) as strategic investments;

d. Proyek Strategis Nasional dan/atau percepatan pembangunan nasional yang ditugaskan oleh Pemerintah kepada Perusahaan.

7. Melakukan pembahasan terkait dengan aksi - aksi korporasi dan memberikan tanggapan dan arahan atas aksi-aksi korporasi Perusahaan.
8. Tugas khusus dari Direksi
   a. Pemberian tugas khusus kepada Komite GRC oleh Direksi dilakukan dengan perintah tertulis yang memuat:
      - Nama yang diberi tugas;
      - Sifat penugasan;
      - Lingkup pekerjaan;
      - Tujuan dan sasaran pekerjaan; dan
      - Jangka waktu penugasan.
   b. Lingkup pekerjaan tugas khusus bagi Komite GRC sepenuhnya ditentukan oleh Direksi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;
   c. Dalam melaksanakan tugas khusus Komite GRC dapat:
      - Melakukan *review* terhadap semua catatan, dokumen dan informasi lainnya yang diperlukan termasuk Notulen Rapat Direksi, serta dapat meminta Notulen Rapat Dewan Komisaris (*jika dianggap perlu dan diperbolehkan Dewan Komisaris*);
      - Melakukan analisis dan evaluasi, bekerjasama dengan struktural unit kerja terkait atau dengan Komite dibawah Dewan Komisaris, serta dapat meminta bantuan tenaga ahli atau konsultan untuk membantu komite GRC dengan beban Perusahaan.
   d. Komite GRC menyampaikan laporan pelaksanaan tugas khusus kepada Direksi dan apabila berhubungan dengan Dewan Komisaris, maka laporannya wajib ditembuskan ke Dewan Komisaris.

d. National Strategic Projects and/or national development acceleration assigned by the Government to the Company.

7. Conducting discussions related to corporate actions and providing responses and direction on the Company's corporate actions.
8. Special Duties of the Board of Directors
   a. The assignment of special duties to GRC Committee by the Board of Directors is carried out by means of a written order containing:
      - Name of the person assigned;
      - Nature of the assignment;
      - Scope of work;
      - Objectives and targets of the work; and
      - Duration of assignment.
   b. The scope of work for GRC Committee's special duties is fully determined by the Board of Directors, provided that it does not conflict with applicable laws and regulations.
   c. In carrying out its special duties, GRC Committee may:
      - Review all necessary records, documents, and other information, including minutes of Board of Directors meetings, and may request minutes of Board of Commissioners meetings (if deemed necessary and permitted by the Board of Commissioners);
      - Conduct analysis and evaluation, in collaboration with related structural work units or committees under the Board of Commissioners, and may request the assistance of experts or consultants to assist GRC Committee with the Company's responsibilities.
   d. GRC Committee submits a report on the implementation of special tasks to the Board of Directors and if it relates to the Board of Commissioners, the report must be copied to the Board of Commissioners.

STRUKTUR KEANGGOTAAN KOMITE TATA KELOLA, MANAJEMEN RISIKO DAN KEPATUHAN

GOVERNANCE, RISK MANAGEMENT AND COMPLIANCE COMMITTEE MEMBERSHIP STRUCTURE

No.	JABATAN DEPARTMENT	POSISI POSITION
1.	Group Head yang membidangi fungsi Manajemen Risiko dan Tata Kelola Group Head in charge of Risk Management and Governance function	Ketua Chairman
2.	Group Head yang membidangi fungsi Hukum Group Head in charge of Legal function	Sekretaris Secretary
3.	Group Head yang membidangi fungsi Strategi Korporasi dan Inovasi Group Head in charge of Corporate Strategy and Innovation function	Anggota Member
4.	Group Head yang membidangi fungsi Manajemen Portofolio Anak Perusahaan Group Head in charge of Subsidiary Portfolio Management function	Anggota Member

No.	JABATAN DEPARTMENT	POSISI POSITION
5.	Group Head yang membidangi fungsi Perencanaan dan Performa Keuangan Group Head in charge of Subsidiary Portfolio Management function	Anggota Member
6.	Group Head yang membidangi fungsi Pengelolaan Keuangan Group Head in charge of Financial Planning and Performance function	Anggota Member
7.	Group Head yang membidangi fungsi Sekretariat Perusahaan Group Head in charge of Corporate Secretariat function	Anggota Member

PROFIL KOMITE TATA KELOLA, MANAJEMEN RISIKO DAN KEPATUHAN

GOVERNANCE, RISK MANAGEMENT AND COMPLIANCE COMMITTEE PROFILE

Usman Saroni
Ketua merangkap Anggota/ Group Head Manajemen Risiko Tata Kelola dan Kepatuhan
Chairman and Member/Group Head of Risk Management, Governance, and Compliance

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Kepala Group Head Manajemen Risiko Tata Kelola dan Kepatuhan dalam Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini

Profile can be found in the Profile of Group Head of Risk Management, Governance, and Compliance section in the Corporate Governance Chapter of this Annual Report.

Akhirman
Anggota/Group Head Hukum
Member / Group Head of Legal

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Profil Komite Pelindo Bersih dalam Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini

Profile can be found in the Profile of Pelindo Bersih Committee Profile section in the Corporate Governance Chapter of this Annual Report.

Abdul Rofid Fanany
Anggota/Group Head Strategi Korporasi dan Pengembangan Bisnis
Member/Group Head of Corporate Strategy and Business Development

Warga Negara Indonesia. Beliau lulusan Sarjana Akuntansi dari Universitas Airlangga (1998), Magister Akuntansi dari Universitas Diponegoro (2010). Beliau pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT. Pelindo Husada Citra (2021-2022), Direktur Utama PT. Terminal Petikemas Surabaya (Juni 2022-November 2022), Group Head Strategi dan Pengembangan Bisnis (Mei 2025 – Sekarang)

Indonesian citizen. Holds a Bachelor of Accounting degree from Airlangga University (1998) and a Master of Accounting degree from Diponegoro University (2010). Previously served as President Director of PT. Pelindo Husada Citra (2021-2022), President Director of PT. Terminal Petikemas Surabaya (June 2022-November 2022), and Group Head of Strategy and Business Development (May 2025-present).

Cucu Kuswoyo
Anggota/Group Head Manajemen Portofolio Anak
Member/Group Head of Subsidiary Portfolio Management

Warga Negara Indonesia. Lahir di Cilacap, 12 Desember 1978. Beliau lulusan Sarjana Ekonomi Akuntansi Universitas Gadjah Mada (2003) dan Magister Logistik Global Kuhne Logistik University (2013). Beliau Pernah menjabat sebagai Plt. SVP Pembinaan Anak Perusahaan dan Pengembangan Penugasan Bisnis (2023), SVP Pembinaan Anak Perusahaan dan Pengembangan Penugasan Bisnis (2023-2024), Plt SVP Anak Perusahaan dan Pengembangan Penugasan Bisnis (2022).

Indonesian citizen. Born in Cilacap, December 12, 1978. Graduated with a Bachelor of Economics in Accounting from Gadjah Mada University (2003) and a Master of Global Logistics from Kuhne Logistik University (2013). Previously served as Acting SVP of Subsidiary Development and Business Assignment Development (2023), SVP of Subsidiary Development and Business Assignment Development (2023-2024), Acting SVP of Subsidiary and Business Assignment Development (2022).

Aris Subagyo
Anggota/Group Head Perencanaan dan Performa
Member/Group Head of Planning and Performance

Warga Negara Indonesia. Lahir di Kulon Progo, 15 Oktober 1973. Beliau lulusan Sarjana Ekonomi Akuntansi Universitas Gadjah Mada (2002). Beliau Pernah menjabat sebagai Group Head Anggaran dan Pelaporan (2022-2023), Group Head Anggaran dan Pelaporan (2021-2022), SVP Perencanaan & Pengendalian Keuangan Kantor Pusat (2021).

Indonesian citizen. Born in Kulon Progo, October 15, 1973. Graduated with a Bachelor of Economics and Accounting from Gadjah Mada University (2002). Previously served as Group Head of Budget and Reporting (2022-2023), Group Head of Budget and Reporting (2021-2022), and Senior Vice President of Financial Planning & Control at Head Office (2021).

Faldi Saputra
Anggota/Group Head Pengelolaan Keuangan
Member/Group Head of Financial Management

Warga Negara Indonesia. Lahir di Lhokseumawe, 17 Mei 1987. Beliau lulusan Sarjana UNSYIAH (2010). Beliau Pernah menjabat sebagai SVP Treasuri (2021), VP Perbendaharaan dan Pendapatan (2020-2021).

Indonesian citizen. Born in Lhokseumawe, May 17, 1987. Graduated with a Bachelor's degree from UNSYIAH (2010). Previously served as Senior Vice President of Treasury (2021), Vice President of Treasury and Revenue (2020-2021).

Ali Sodikin
Anggota / Group Head Sekretaris Perusahaan
Member / Group Head of Corporate Secretary

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Kepala Group Sekretaris Perusahaan dalam Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini

Profile can be found in the Profile of the Group Head of Corporate Secretary section in the Corporate Governance Chapter of this Annual Report.

INDEPENDENSI KOMITE TATA KELOLA, MANAJEMEN RISIKO DAN KEPATUHAN

Seluruh anggota Komite tidak memiliki afiliasi dengan Direktur lainnya, Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali, bukan merupakan pemegang saham Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, Komisaris, Direktur maupun pekerja dari perusahaan yang memiliki afiliasi maupun bisnis dengan Perseroan.

PELAKSANAAN TUGAS KOMITE TATA KELOLA, MANAJEMEN RISIKO DAN KEPATUHAN

Rapat Komite Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan dipimpin oleh Ketua Komite. Opini dan rekomendasi Komite dapat disampaikan secara langsung dalam forum rapat dan dinyatakan sah apabila rapat dihadiri oleh Ketua Komite dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota Komite sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite secara berkala menyelenggarakan rapat koordinasi dengan fungsi Tata Kelola, fungsi Manajemen Risiko, dan fungsi Kepatuhan guna memastikan efektivitas pengawasan, penguatan pengendalian internal, serta keselarasan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di seluruh lini organisasi.

Sepanjang tahun 2025, Komite Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan telah melaksanakan rapat dan menjalankan fungsi pengawasan serta pemberian rekomendasi sesuai dengan ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya, termasuk namun tidak terbatas pada evaluasi implementasi tata kelola perusahaan, penguatan manajemen risiko, serta pemantauan kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan internal perusahaan.

Adapun pelaksanaan rapat dan pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan selama tahun 2025 sebagai berikut:

GOVERNANCE, RISK MANAGEMENT AND COMPLIANCE COMMITTEE INDEPENDENCE

All Committee members have no affiliation with other Board of Directors, Board of Commissioners or Controlling Shareholders, are not shareholders of the Company that may affect their ability to act independently, Board of Commissioners, Board of Directors or employees of companies that have affiliation or business with the Company.

IMPLEMENTATION OF GOVERNANCE, RISK MANAGEMENT, AND COMPLIANCE COMMITTEE'S DUTIES

Governance, Risk Management, and Compliance Committee Meetings are chaired by the Committee Chairman. The Committee's opinions and recommendations may be presented directly during the meeting and are deemed valid if attended by the Committee Chairman and at least three (3) Committee members, in accordance with applicable regulations.

In carrying out its duties, the Committee regularly holds coordination meetings with the Governance, Risk Management, and Compliance functions to ensure effective supervision, strengthening internal controls, and harmonizing the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles across the organization.

Throughout 2025, Governance, Risk Management, and Compliance Committee held meetings and carried out its supervisory function and provided recommendations in accordance with the scope of its duties and responsibilities, including but not limited to evaluating corporate governance implementation, strengthening risk management, and monitoring compliance with regulations and internal company policies.

The implementation of meetings and duties of Governance, Risk Management and Compliance Committee during 2025 are as follows:

No	Tanggal Date	Agenda
1	05 Mei 2025 May 5, 2025	Pembahasan Atas Item Usulan Investasi Tahun 2025 Dengan Nilai Di Atas Rp 100 Miliar – Usulan Revisi Investasi Tahun 2025 Pekerjaan Penanggulangan Abrasi di Pelabuhan Pulau Baai Regional 2 Bengkulu Discussion of Proposed Investment Items in 2025 with a Value Above Rp100 Billion – Proposed Investment Revision for 2025: Abrasion Mitigation Work at Pulau Baai Port, Region 2, Bengkulu
2	07 Agustus 2025 August 7, 2025	Penyampaian Rekomendasi Komite GRC Terhadap Usulan Revisi Investasi Tahun 2025 Peningkatan Modal PT API dalam Rangka Pelunasan ICL Pelindo dan SHL PSL Submission of GRC Committee's Recommendation on the Proposed Investment Revision for 2025: PT API's Capital Increase in Repayment of Pelindo's ICL and SHL PSL
3	24 September 2025 September 24, 2025	Pembahasan Atas Item Usulan Investasi Tahun 2025 Dengan Nilai Diatas Rp100 Milyar Discussion of Proposed Investment Items in 2025 with a Value Above Rp100 Billion
4	06 Oktober 2025 October 6, 2025	Pembahasan Atas Item Usulan Investasi Tahun 2026 Dengan Nilai Diatas Rp100 Milyar Discussion of Proposed Investment Items in 2026 with a Value Above Rp100 Billion

AKUNTAN PUBLIK

PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK

Pemilihan penyedia jasa KAP dilakukan dengan e-proc, dimulai dengan mengundang pelaku usaha dengan status activated pada tanggal 12 Agustus 2024. Sedangkan untuk proses pengadaan dari pendaftaran hingga negosiasi dilakukan sejak tanggal 12 - 29 Agustus 2024. Penetapan pelaksana pekerjaan dikeluarkan pada tanggal 4 September 2024 dan disampaikan melalui surat dari direktur penyelenggara kepada dewan komisaris pada tanggal 9 September 2024.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK, NAMA AKUNTAN DAN FEE

Tabel Kantor Akuntan Publik, Nama Akuntan dan Fee
Public Accounting Firm, Accountant Name and Fee

Tahun Year	**Kantor Akuntan Publik** Public Accounting Firm	**Periode KAP** PAF Period	**Nama Akuntan (Partner Penanggung Jawab)** Accountant Name (Responsible Partner)	**Periode AP** PA Period	**Fee Jasa Audit** Audit Service Fee
2025	**Ernst Young**	**Periode Kedua Belas** Twelfth Period	**Budi Hartono**	**Periode Kesatu** First Period	**Rp14.570.000.000**
2024	Ernst Young	Periode Kesebelas Eleventh Period	Moch Dadang Syachruna	Periode Kelima Fifth Period	Rp13.235.000.000
2023	Ernst Young	Periode Kesepuluh Tenth Period	Moch Dadang Syachruna	Periode Keempat Fourth Period	Rp11.795.000.000
2022	Ernst Young	Periode Kesembilan Ninth Period	Moch Dadang Syachruna	Periode Ketiga Third Period	Rp10.000.010.917
2021	Ernst Young	Periode Kedelapan Eighth Period	Moch Dadang Syachruna	Periode Kedua Second Period	Rp4.438.792.110
2020	Ernst Young	Periode Ketujuh Seventh Period	Moch Dadang Syachruna	Periode Pertama First Period	Rp3.802.636.200

JASA LAIN YANG DIBERIKAN AKUNTAN

Selama tahun 2025, tidak terdapat jasa lain yang diberikan akuntan.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Sistem Pengendalian Internal merupakan aspek yang sangat penting dalam penerapan GCG, karena dapat mendorong Perseroan menjadi lebih transparan, akuntabel, responsibel, mandiri, adil, dan terpercaya. Sistem Pengendalian Internal yang efektif dan andal mampu memberikan keyakinan bagi para *stakeholder* bahwa seluruh sumber daya yang dimiliki dapat dikelola dengan baik dalam rangka mencapai tujuan Perseroan. Terselenggaranya Sistem Pengendalian Internal yang andal dan efektif di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) menjadi tanggung jawab dari Manajemen Perseroan.

PUBLIC ACCOUNTANT

APPOINTMENT OF PUBLIC ACCOUNTANT

The selection of Public Accounting Firm (KAP) service provider was conducted through an e-procurement process, beginning with the invitation of business participants with activated status on August 5, 2025. The procurement process, from registration to negotiation, took place from October 2 to October 7, 2025. The appointment of the service provider was issued on October 21, 2025, and formally communicated through a letter from the President Director to the Board of Commissioners on October 24, 2025.

PUBLIC ACCOUNTING FIRM, ACCOUNTANT NAME AND FEE

OTHER SERVICES PROVIDED BY THE ACCOUNTANT

During 2025, the accountant provided no other services.

INTERNAL CONTROL SYSTEM

Internal Control System is a very crucial aspect in GCG implementation, because it can encourage the Company to be more transparent, accountable, responsible, independent, fair, and reliable. An effective and reliable Internal Control System is able to provide confidence to stakeholders that all available resources can be managed properly in order to achieve the Company's goals. The implementation of a reliable and effective Internal Control System at PT Pelabuhan Indonesia (Persero) is the responsibility of the Company's Management.

Sistem Pengendalian Intern Perseroan merupakan suatu proses pengendalian yang dilaksanakan secara terus menerus oleh Direksi, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana, dirancang untuk memberikan keyakinan memadai terhadap pencapaian visi, misi, sasaran, dan tujuan Perseroan.

TUJUAN PENGENDALIAN

1. Efisiensi dan Efektivitas Operasional
   Dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya Perseroan dalam rangka mencapai tujuan Perseroan.
2. Keandalan Pelaporan
   Dimaksudkan untuk menjamin laporan yang akurat, wajar, tepat waktu, dan relevan, sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Penyajian dan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan dan operasional lebih terjamin dengan adanya pengendalian intern yang efektif. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan bahwa seluruh data yang diolah adalah transaksi yang sah dan telah mendapat otorisasi, serta seluruh transaksi telah dicatat pada tanggal terjadinya dengan nilai yang akurat.
3. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan
   Dimaksudkan untuk memastikan bahwa semua kegiatan Perseroan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau pihak berwenang lainnya, maupun kebijakan, ketentuan, dan prosedur yang ditetapkan oleh Perseroan.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PERSEROAN

Kerangka konseptual pengendalian internal COSO sebagai kerangka kerja yang komprehensif untuk mengukur efektivitas pengendalian internal terdiri dari 5 (lima) komponen, yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*);
2. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*);
3. Kegiatan Pengendalian (*Control Activites*);
4. Informasi dan Komunikasi (*Information & Communication*);
5. Pemantauan dan Evaluasi (*Monitoring*).

LINGKUNGAN PENGENDALIAN (*CONTROL ENVIRONMENT*)

Komponen Lingkungan Pengendalian di Perusahaan terdiri dari 5 (lima) prinsip, yaitu:

1. Menunjukkan Komitmen terhadap Integritas dan Nilai Etika.
   Perusahaan menunjukkan komitmen terhadap penegakan integritas dan nilai etika dengan:
   a. Menegakkan keteladanan melalui arahan, tindakan, dan perilaku, komitmen terhadap integritas dan nilai etika untuk mendukung efektivitas Sistem Pengendalian Intern oleh Dewan Komisaris dan Direksi.
   b. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku (*code of conduct*) yang mendefinisikan integritas dan nilai etika.

The Company's Internal Control System is a control process implemented continuously by Board of Directors, Structural Officers, Functional Officers, and Executives, designed to provide adequate assurance of the achievement of the Company's vision, mission, goals, and objectives.

OBJECTIVES OF CONTROL

1. Operational Efficiency and Effectiveness
   Intended to increase effectiveness and efficiency in managing the Company's resources in order to achieve the Company's objectives.
2. Reporting Reliability
   Intended to guarantee accurate, fair, timely and relevant reports, as a basis for making appropriate and accountable decisions. The presentation and disclosure of information in financial and operational reports is more secure with effective internal control. This is intended to provide assurance that all processed data are valid and authorized transactions, and all transactions have been recorded on the date of occurrence with accurate values.

3. Compliance with Laws and Regulations
   Intended to ensure that all of the Company's activities are carried out in accordance with the applicable laws and regulations, both provisions issued by the government or other authorities, as well as policies, provisions, and procedures established by the Company.

INTERNAL CONTROL SYSTEM OF THE COMPANY

The conceptual framework of COSO internal control as a comprehensive framework for measuring the effectiveness of internal control consists of 5 (five) components:

1. Control Environment;
2. Risk Assessment;
3. Control Activities;
4. Information and Communication;

5. Monitoring and Evaluation.

CONTROL ENVIRONMENT

The Control Environment Component in the Company consists of 5 (five) principles, namely:

1. Demonstrating Commitment to Integrity and Ethical Values.
   The Company demonstrates commitment to upholding integrity and ethical values by:
   a. Upholding role models through direction, actions, and behavior, commitment to integrity and ethical values to support the effectiveness of Internal Control Systems by Board of Commissioners and Board of Directors.
   b. Developing and implementing code of conduct that defines integrity and ethical values.

c. Mengevaluasi kepatuhan terhadap aturan perilaku.
d. Mengidentifikasi pelanggaran terhadap aturan perilaku dan memperbaiki secara tepat waktu dan konsisten.
e. Penetapan target dan sasaran yang realistis dapat dicapai dan tidak menuntut pegawai untuk mencapai sasaran yang tidak realistis.
f. Memberikan penghargaan yang sepadan kepada pegawai atas prestasi kerjanya dalam rangka penegakkan integritas dan kepatuhan terhadap nilai etika.
g. Menegakkan sanksi sesuai aturan yang berlaku atas pelanggaran terhadap integritas dan nilai etika.

2. Implementasi Tanggung Jawab Pengawasan
Dewan Komisaris bersikap independen terhadap Direksi dan mengimplementasikan pengawasan terhadap pengembangan dan pelaksanaan dari pengendalian internal.
a. Tanggung jawab pengawasan oleh Dewan Komisaris
Dewan Komisaris mengidentifikasi dan menerima tanggung jawab pengawasan terhadap kecukupan dan efektivitas pengendalian internal.
b. Memegang atau mendelegasikan tanggung jawab pengawasan
Dewan Komisaris memegang tanggung jawab pengawasan atau mendelegasikan tanggung jawab tersebut Direksi untuk mendukung pencapaian tujuan Perseroan.
c. Mengimplementasikan keahlian yang relevan
Dewan Komisaris mendefinisikan dan secara periodik menilai pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh anggota-anggota Dewan Komisaris untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk bersikap kritis terhadap Direksi dan mengambil tindakan yang diperlukan.
d. Beraktivitas secara independen
Dewan Komisaris memiliki jumlah anggota yang cukup, bersikap independen, dan objektif.
3. Mencapai Tujuan Perusahaan
Direksi membentuk struktur organisasi, jalur pelaporan dan kewenangan, serta pertanggungjawaban yang memadai untuk mencapai tujuan Perusahaan, yaitu:

a. Direksi dan Dewan Komisaris berada di Lini Pertama yang mempertimbangkan berbagai struktur yang digunakan (seluruh struktur entitas) termasuk unit operasional, entitas legal, penyedia jasa (*outsourcing*) untuk mendukung pencapaian tujuan Perusahaan.
b. Manajemen mendesain dan mengevaluasi pola pelaporan untuk setiap struktur atau entitas agar mampu mengeksekusi kewenangan, tanggung jawab serta arus informasi dalam mengelola aktivitasnya.
c. Direksi dan Dewan Komisaris mendelegasikan kewenangan, mendefinisikan, dan mengalokasikan, serta memisahkan fungsi secara memadai pada berbagai tingkatan dalam organisasi.

c. Evaluating compliance with the code of conduct.
d. Identify code of conduct violations and correct them in a timely and consistent manner.

e. Setting realistic targets and goals that are achievable and not requiring employees to achieve unrealistic goals.
f. Providing commensurate awards to employees for their work achievements in the context of upholding integrity and compliance with ethical values.

g. Enforcing sanctions in accordance with applicable regulations for violations of integrity and ethical values.

2. Implementation of Supervisory Responsibilities
Board of Commissioners acts independently toward Board of Directors and implements oversight of the development and implementation of internal control.

a. Supervisory responsibilities by Board of Commissioners
Board of Commissioners identifies and accepts supervisory responsibility for the adequacy and effectiveness of internal control.
b. Holding or delegating supervisory responsibilities

Board of Commissioners holds supervisory responsibilities or delegates these responsibilities to Board of Directors to support the achievement of the Company's objectives.
c. Implement relevant skills
Board of Commissioners defines and periodically assesses the knowledge and skills required by members of Board of Commissioners to improve their ability to be critical of Board of Directors and take necessary action.

d. Work independently
Board of Commissioners has a sufficient number of members, is independent and objective.
3. Achieving Company Objectives
Board of Directors establishes an adequate organizational structure, reporting lines and authority, and accountability to achieve the Company's objectives, namely:
a. Board of Directors and Board of Commissioners are in the First Line which considers the various structures used (all entity structures) including operational units, legal entities, service providers (outsourcing) to support the achievement of the Company's objectives.
b. Management designs and evaluates the reporting pattern for each structure or entity to be able to execute the authority, responsibility and information flow in managing its activities.

c. Board of Directors and Board of Commissioners delegate authority, define and allocate, and adequately separate functions at various levels in the organization.

d. Manajemen melaksanakan evaluasi, penyesuaian, dan perbaikan terhadap struktur organisasi dalam hal terjadi perubahan lingkungan yang strategis.

e. Menetapkan jumlah pegawai yang sesuai untuk formasi yang dibutuhkan Perusahaan.

4. Komitmen terhadap Kompetensi
Perusahaan menunjukkan komitmen terhadap kompetensi pegawai melalui tahapan proses untuk merekrut, mengembangkan, dan mempertahankan individu yang berkompeten, dengan cara:
   a. Menyusun Kebijakan dan Praktik Standar Kompetensi yang menggambarkan harapan organisasi atas kompetensi yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian tujuan Perusahaan.
   b. Mengalokasikan pemenuhan kebutuhan untuk pembinaan dan pelatihan yang diperlukan untuk merekrut, mengembangkan, dan mempertahankan kecukupan dan kompetensi pekerja dan penyedia jasa *outsourcing*.
   c. Mengevaluasi kompetensi seluruh tingkat dan individu organisasi, termasuk penyedia jasa *outsourcing*, terkait dengan kebijakan dan praktik yang ditetapkan, dan bertindak memadai untuk mengatasi kekurangan.
   d. Merencanakan dan menyiapkan suksesi pelimpahan tanggung jawab secara signifikan.
5. Pengendalian Intern
Perusahaan meminta pertanggungjawaban individual atas area Pengendalian Intern yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan yang meliputi:
   a. Penegakan Akuntabilitas melalui Struktur, Kewenangan, dan Tanggung Jawab dengan cara membangun mekanisme untuk mengkomunikasikan dan menuntut para pekerja agar akuntabel atas pelaksanaan tanggung jawab Pengendalian Intern organisasi dan mengimplementasikan tindakan koreksi jika diperlukan.
   b. Pembangunan Pengukuran Kinerja, Insentif, dan Penghargaan dengan caramembangun ukuran kinerja, insentif, dan penghargaan yang layak bagi pertanggungjawaban pada setiap level entitas, yang menggambarkan dimensi dan kinerja dan standar perilaku, dan mempertimbangkan pencapaian tujuan jangka pendek dan jangka panjang;
   c. Mengevaluasi Ukuran Kinerja, Insentif, dan Penghargaan dengan caramenyelaraskan insentif dan penghargaan dengan pemenuhan tanggung jawab Pengendalian Intern dalam pencapaian tujuan Perusahaan.
   d. Mempertimbangkan Tekanan Berlebihan dengan cara mengevaluasi dan menyesuaikan tekanan-tekanan yang berkaitan dengan pencapaian tujuan ketika memberikan tanggung jawab mengembangkan ukuran kinerja, dan mengevaluasi kinerja.

d. Management conducts evaluations, adjustments, and improvements to the organizational structure in the event of strategic environmental changes.

e. Determining the appropriate number of employees for the formation required by the Company.

4. Commitment on Competencies
The Company demonstrates commitment to employee competencies through the stages of process to recruit, develop and retain competent individuals, by:
   a. Developing Competency Standard Policies and Practices that describe the organization's expectations of the competencies needed to support the achievement of the Company's objectives.
   b. Allocating the fulfillment of needs for coaching and training required to recruit, develop, and maintain adequate and competent workers and outsourcing service providers.
   c. Evaluate the competence of all levels and individuals of the organization, including outsourced service providers, in relation to established policies and practices, and act accordingly to address deficiencies.
   d. Plan and prepare for the succession of significant delegations of responsibility.
5. Internal Control
The Company holds individuals accountable for the areas of Internal Control for which they are responsible in order to achieve the objectives which include:
   a. Enforcement of Accountability through Structure, Authority, and Responsibility by establishing mechanisms to communicate and hold workers accountable for carrying out the organization's Internal Control responsibilities and implementing corrective actions where necessary.
   b. Building Performance Measures, Incentives, and Rewards by building appropriate performance measures, incentives, and rewards for accountability at each level of the entity, which describes the dimensions and performance and behavior standards, and considers the achievement of short-term and long-term goals;
   c. Evaluating Performance Measures, Incentives, and Rewards by aligning incentives and rewards with the fulfillment of Internal Control responsibilities in achieving Company objectives.
   d. Considering Excessive Pressure by evaluating and adjusting pressures related to achieving goals when assigning responsibility for developing performance measures, and evaluating performance.

e. Mengevaluasi Kinerja, dan Penghargaan atau Sanksi Disiplin Individu dengan caramengevaluasi pelaksanaan tanggung jawab Pengendalian Intern, termasuk kepatuhan terhadap aturan dan tingkat kompetensi yang diharapkan dapat memberikan penghargaan atau sanksi disiplin.

PENILAIAN RISIKO (RISK ASSESSMENT)

Penilaian Risiko (*Risk Assesment*) merupakan basis untuk menentukan bagaimana risiko akan dikelola. Sebelum melakukan penilaian risiko, terlebih dahulu harus ditetapkan tujuan Perusahaan sampai pada tingkat kegiatan, yang dibagi menjadi tujuan operasional, pelaporan, dan kepatuhan. Penetapan tujuan Perusahaan memuat pernyataan dan arahan spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu serta dikomunikasikan ke seluruh pegawai.

Komponen Penilaian Risiko terdiri dari 4 (empat) prinsip, yaitu:

1. Perusahaan menetapkan tujuan secara jelas untuk implementasi proses identifikasi dan penilaian risiko-risiko terkait dengan tujuan dengan atribut-atribut Pengendalian Intern sebagai berikut:
   a. Atribut Terkait Tujuan Operasional
      - Manajemen mempertimbangkan tingkat risiko yang dapat diterima dalam pencapaian tujuan operasional.
      - Tujuan operasional menggambarkan pilihan manajemen terkait struktur, pertimbangan industri, dan kinerja Perseroan.
      - Perseroan menggambarkan tingkat kinerja operasional dan keuangan yang diharapkan dalam tujuan operasional.
      - Manajemen menggunakan tujuan operasional sebagai dasar untuk mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kinerja operasional dan keuangan yang diharapkan.

   b. Untuk tujuan pelaporan, atribut diberdakan menjadi:
      - Tujuan Pelaporan Internal (Keuangan dan/atau Non-Keuangan)
        - » Manajemen mempertimbangkan tingkat akurasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dalam tujuan pelaporan non-keuangan dan materialitas, serta dalam tujuan pelaporan keuangan.
        - » Pelaporan internal menyediakan informasi yang akurat dan lengkap terkait pilihan manajemen dan informasi yang dibutuhkan dalam mengelola Perseroan.
        - » Pelaporan eksternal menggambarkan transaksi dan kejadian yang mendasarinya dalam rentang batas yang dapat diterima.
      - Tujuan Pelaporan Keuangan Eksternal
        - » Manajemen mempertimbangkan materialitas dalam penyajian laporan keuangan.

e. Evaluating Performance, and Rewards or Disciplinary Sanctions for Individuals by evaluating the implementation of Internal Control responsibilities, including compliance with rules and the level of competence expected to provide rewards or disciplinary sanctions.

RISK ASSESSMENT

Risk assessment is the basis for determining how risks will be managed. Before conducting a risk assessment, the Company's objectives must first be set down to the activity level, which is divided into operational, reporting and compliance objectives. The Company's goal setting contains statements and directions that are specific, measurable, achievable, realistic and timebound, and communicated to all employees.

The Risk Assessment component consists of 4 (four) principles, namely:

1. The Company sets clear goals for the implementation of the process of identifying and assessing risks related to objectives with the following Internal Control attributes:
   a. Attributes Related to Operational Goals
      - Management considers the level of risk that is acceptable in achieving operational goals.
      - Operational goals describe management's choices regarding the structure, industry considerations, and performance of the Company.
      - The Company describes the expected level of operational and financial performance in the operational objectives.
      - Management uses the operational objectives as a basis for allocating the resources needed to achieve operational and financial performance needed to achieve the expected operational and financial performance.
   b. For reporting purposes, attributes are divided into:
      - Internal Reporting Objectives (Financial and/or NonFinancial)
        - » Management considers the level of accuracy appropriate to user needs in non-financial reporting objectives and materiality, as well as in financial reporting objectives.
        - » Internal reporting provides accurate and complete information related to management choices and information needed to manage the Company.
        - » External reporting describes the underlying transactions and events within acceptable limits.
      - Objectives of External Financial Reporting
        - » Management considers materiality in the presentation of financial statements.

» Tujuan pelaporan keuangan konsisten dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan tersedia di
» Perseroan. Prinsip akuntansi dipilih sesuai dengan keadaan dan mematuhi Standar Akuntansi Keuangan.

» Pelaporan eksternal menggambarkan transaksi dan kejadian yang mendasarinya dalam rentang batas yang dapat diterima.

- Tujuan Pelaporan Non-Keuangan Eksternal
  - » Manajemen menggambarkan tingkat akurasi yang dipersyaratkan yang cocok dengan kebutuhan pengguna laporan dan didasarkan pada kriteria yang ditetapkan oleh pihak ketiga atas pelaporan non-keuangan.
  - » Manajemen menetapkan tujuan secara konsisten dengan standar dan kerangka yang dibangun oleh organisasi eksternal yang diakui.
  - » Pelaporan eksternal menggambarkan transaksi dan kejadian yang mendasarinya dalam rentang batas yang dapat diterima.

c. Atribut terkait Tujuan Kepatuhan
- Manajemen mempertimbangkan tingkat risiko yang dapat diterima terkait pencapaian tujuan kepatuhan.
- Hukum dan aturan merupakan standar minimal yang diintegrasikan ke dalam tujuan kepatuhan.

2. Perseroan mengidentifikasi risiko untuk mencapai tujuannya dan menganalisis risiko sebagai dasar untuk menentukan bagaimana risiko dapat dikelola. Proses identifikasi dan analisis risiko diatur lebih lanjut dalam Kerangka Manajemen Risiko Perusahaan. Beberapa aktivitas dalam menganalisis risiko adalah sebegai berikut:
   a. Perseroan melaksanakan mekanisme penilaian risiko yang efektif dan melibatkan berbagai tingkatan manajemen.
   b. Perseroan mengidentifikasi dan menilai risiko pada tingkat entitas, anak usaha, divisi, unit operasional, dan fungsional yang relevan dengan pencapaian tujuan Perseroan.
   c. Identifikasi risiko mempertimbangkan faktor internal dan eksternal dan bagaimana dampaknya terhadap pencapaian tujuan Perseroan.
   d. Risiko yang teridentifikasi dianalisis melalui suatu proses, termasuk estimasi tingkat kemungkinan dan potensi signifikansi.
   e. Penilaian risiko termasuk mempertimbangkan bagaimana risiko-risiko signifikan seharusnya dikelola, dan apakah diterima, dihindari, dikurangi, atau dialihkan.
3. Organisasi mempertimbangkan potensi terjadi kecurangan (*fraud*) dan penyuapan dalam menilai risiko untuk pencapaian tujuan Perseroan.

» The financial reporting objectives are consistent with the accounting principles applicable and available to the Company.
» Accounting principles are selected according to the circumstances and comply with Financial Accounting Standards.
» External reporting describes the underlying transactions and events within acceptable ranges. Objectives of External

- Non-Financial Reporting
  - » Management describes the required level of accuracy that matches the needs of report users and is based on criteria established by third parties for non-financial reporting.

  - » Management sets objectives consistent with standards and frameworks developed by recognized external organizations.

  - » External reporting describes the underlying transactions and events within acceptable ranges.

c. Attributes related to Compliance Objectives
- Management considers the acceptable level of risk associated with achieving compliance objectives.
- Laws and regulations are the minimum standards integrated into the compliance objectives.

2. The Company identifies risks to achieve its objectives and analyzes risks as a basis for determining how risks can be managed. The process of risk identification and analysis is further regulated in the Company's Risk Management Framework. Some activities in analyzing risks are as follows:

   a. The Company implements an effective risk assessment mechanism involving various levels of management.
   b. The Company identifies and assesses risks at the entity, subsidiary, division, operational unit, and functional levels that are relevant to the achievement of the Company's objectives.
   c. Risk identification considers internal and external factors and how they impact the achievement of the Company's objectives.
   d. Identified risks are analyzed through a process, including estimation of likelihood and potential significance.
   e. Risk assessment includes considering how significant risks should be managed, and whether they should be accepted, avoided, reduced or transferred.
3. The organization considers the potential for fraud and bribery in assessing risks to the achievement of the Company's objectives.

a. Penilaian risiko kecurangan (*fraud*) mempertimbangkan kemungkinan kehilangan aset, laporan manipulatif, dan korupsi yang diakibatkan oleh berbagai cara untuk melakukan tindakan kecurangan (*fraud*) dan tidak patut.
b. Penilaian risiko mempertimbangkan faktor signifikan yang mempengaruhi kehilangan atas aset dan dampak signifikan terkait aktivitas operasional, pelaporan, dan kepatuhan.
c. Penilaian risiko kecurangan (*fraud*) mempertimbangkan insentif dan tekanan.
d. Penilaian risiko kecurangan (*fraud*) mempertimbangkan kesempatan untuk mengakuisisi, menggunakan, atau melepas aset secara tidak sah, mengubah catatan pelaporan entitas, atau melakukan tindakan kecurangan (*fraud*) lainnya.
e. Penilaian risiko kecurangan (*fraud*) mempertimbangkan bagaimana manajemen dan pekerja lainnya dapat menjustifikasi tindakan tidak patut.
f. Penilaian risiko mempertimbangkan tindakan memberi/menerima suap kepada pihak eksternal/internal yang dapat mempengaruhi proses kerja dan pilihan keputusan pejabat pihak eksternal/internal sehingga mengeluarkan keputusan yang diinginkan dan memberi dampak kerugian bagi Perseroan.

4. Mengidentifikasi dan Menganalisis Perubahan Signifikan
   a. Proses identifikasi risiko mempertimbangkan perubahan faktor eksternal yang secara signifikan mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk mencapai tujuannya.
   b. Perseroan mempertimbangkan dampak potensial dari bisnis baru, perubahan besar pada komposisi bisnis yang ada, mengakuisisi atau melepas operasi bisnis terhadap Sistem Pengendalian Internal, perubahan geografi luar negeri, teknologi baru, dan perubahan lingkungan fisik dimana bisnis beroperasi.
   c. Perseroan mempertimbangkan perubahan dalam manajemen, yaitu perilaku dan filosofi manajemen terhadap Sistem Pengendalian Internal.

KEGIATAN PENGENDALIAN (CONTROL ACTIVITIES) - PENGENDALIAN KEUANGAN DAN OPERASIONAL

Kegiatan Pengendalian (*Control Activities*) dilaksanakan di semua tingkatan Perusahaan, di berbagai tahapan proses bisnis, dan termasuk di lingkup pengembangan teknologi yang meliputi kebijakan prosedur yang membantu untuk menjamin arahan manajemen dapat dilaksanakan dengan benar.

Komponen kegiatan pengendalian terdiri dari 3 (tiga) prinsip, yaitu:

1. Menetapkan dan Mengembangkan Aktivitas Pengendalian

a. Fraud risk assessment considers the possibility of loss of assets, manipulative reports, and corruption resulting from various ways to commit fraud and improper actions.
b. The risk assessment considers significant factors affecting loss of assets and significant impacts on operational, reporting, and compliance activities.
c. The fraud risk assessment considers incentives and pressures.
d. The fraud risk assessment considers opportunities to unlawfully acquire, use, or dispose of assets, alter the entity's reporting records, or commit other acts of fraud.
e. The fraud risk assessment considers how management and other employees may justify improper actions.
f. Risk assessment considers the act of giving/receiving bribes to external/internal parties that can influence the work process and decision choices of external/internal party officials so as to issue the desired decision and have a loss impact on the Company.

4. Identifying and Analyzing Significant Changes
   a. The risk identification process considers changes in external factors that significantly affect the Company's ability to achieve its objectives.
   b. The Company considers the potential impact of new businesses, major changes to the composition of existing businesses, acquiring or disposing of business operations on the Internal Control System, changes in overseas geography, new technology, and changes in the physical environment in which the business operates.
   c. The Company considers changes in management, namely management behavior and philosophy on the Internal Control System.

CONTROL ACTIVITIES - FINANCIAL AND OPERATIONAL CONTROL

Control Activities are implemented at all levels of the Company, at various stages of the business process, and including in the scope of technology development which includes policy procedures that help to ensure management directives can be implemented correctly.

The components of control activities consist of 3 (three) principles, namely:

1. Establish and Develop Control Activities

Perusahaan menetapkan dan mengembangkan aktivitas pengendalian untuk memitigasi risiko signifikan terhadap pencapaian tujuan Perusahaan ke level yang dapat diterima melalui beberapa kegiatan sebagai berikut:

a. Aktivitas pengendalian membantu dan menjamin respons risiko telah dilaksanakan dalam mengatasi dan memitigasi risiko signifikan. Setelah proses penilaian risiko, manajemen mengidentifikasi dan mengimplementasikan aktivitas yang diperlukan untuk merespons risiko tertentu.
b. Manajemen menentukan proses bisnis yang relevan yang membutuhkan aktivitas pengendalian.
c. Manajemen mempertimbangkan kompleksitas, sifat, dan operasional lingkungan, serta karakteristik spesifik dari Perseroan yang mempengaruhi pemilihan dan pengembangan aktivitas pengendalian.
d. Aktivitas pengendalian termasuk rentang, variasi, dan bauran pengendalian untuk memitigasi risiko, dengan mempertimbangkan pengendalian manual dan otomatis, serta pengendalian preventif dan detektif.
e. Manajemen memisahkan fungsi/tugas yang tidak kompatibel (tidak dapat bersamaan), dan ketika pemisahan tersebut menjadi tidak praktis dan efisien, manajemen menentukan dan mengembangkan aktivitas pengendalian alternatif (pengendalian kompensatif).
f. Pemisahan fungsi umumnya membagi tanggung jawab pencatatan, otorisasi, dan persetujuan transaksi, serta penanganan aset terkait. Ketidakadaan pemisahan fungsi dan pengendalian kompensatif akan:
    - Membuat pengendalian internal menjadi tidak efektif, sehingga dapat menimbulkan tindakan kecurangan (*fraud*).
    - Memitigasi risiko terjadinya management *override* (pengabaian manajemen), yang sering terjadi saat melakukan kecurangan (*fraud*).
    - Pemisahan fungsi juga mengurangi risiko kecurangan (*fraud*) oleh satu orang dan risiko kesalahan karena para pihak terpisah tidak saling mereviu pekerjaan pihak lainnya.
    - Namun, kadang kala pemisahan fungsi tidak praktis atau tidak efisien. Dalam situasi ini, manajemen menetapkan dan mengembangkan pengendalian internal alternatif sebagai kompensasi dari tidak diterapkannya prinsip pengendalian internal.
g. Pemisahan fungsi diarahkan untuk mengurangi kesalahan, kecurangan, dan pemborosan. Pemisahan fungsi di lingkungan Perseroan, dilakukan dengan memastikan bahwa:
    - Tidak seorang pun diperbolehkan mengendalikan seluruh aspek utama kejadian dan transaksi dari awal sampai akhir proses.

The Company establishes and develops control activities to mitigate significant risks to the achievement of the Company's objectives to an acceptable level through the following activities:

a. Control activities assist and ensure that risk responses have been implemented to address and mitigate significant risks. Following the risk assessment process, management identifies and implements the activities required to respond to specific risks.
b. Management determines the relevant business processes that require control activities.
c. Management considers the complexity, nature, and operational environment, as well as the specific characteristics of the Company that affect the selection and development of control activities.
d. Control activities include the range, variety, and mix of controls to mitigate risk, taking into account manual and automated controls, as well as preventive and detective controls.
e. Management separates incompatible functions/tasks (cannot concurrently), and when such separation becomes impractical and efficient, management determines and develops alternative control activities (compensative control).
f. Segregation of functions generally divides the responsibilities of recording, authorizing, and approving transactions, and handling the associated assets. The absence of segregation of functions and compensatory controls will:
    - Making internal control ineffective, hence can lead to fraud.
    - Mitigating the risk of management override, which often occurs when committing fraud.
    - The separation of functions also reduces the risk of fraud by one person and the risk of error because the separate parties do not review each other's work.
    - However, sometimes separation of functions is impractical or inefficient. In this situation, management establishes and develops alternative internal controls as compensation for not applying the principles of internal control.
g. Segregation of functions is geared towards reducing errors, fraud, and waste. The separation of functions within the Company is carried out by ensuring that:
    - No one is allowed to control all major aspects of events and transactions from start to finish.

- Pemisahan tanggung jawab dan tugas atas kejadian dan transaksi kepada pegawai yang berbeda berkaitan dengan otorisasi, persetujuan, pemrosesan dan pencatatan, pembayaran atau penerimaan dana, reviu dan audit, serta fungsi-fungsi penyimpanan dan penanganan aset.
- Pembagian tugas kepada lebih dari satu orang pegawai dilakukan secara sistematik untuk memberikan keyakinan adanya *check and balances*.
- Direksi menetapkan kebijakan-kebijakan untuk mengurangi kesempatan terjadinya kolusi.

2. Menetapkan dan Mengembangkan Pengendalian Umum (*General Controls*) terhadap Teknologi
   Manajemen memahami dan menentukan ketergantungan dan hubungan antara proses bisnis, aktivitas pengendalian otomatis, dan pengendalian umum teknologi.
   a. Manajemen menetapkan dan mengembangkan aktivitas pengendalian atas infrastruktur teknologi, yang dirancang dan diimplementasikan untuk membantu menjamin kelengkapan, akurasi, dan keberlangsungan proses teknologi.
   b. Manajemen menetapkan dan mengembangkan aktivitas pengendalian yang didesain dan diimplementasikan untuk membatasi hak akses teknologi hanya bagi pengguna terotorisasi sesuai dengan tanggung jawab tugasnya dan untuk melindungi aset Perseroan dari ancaman eksternal dan internal.
   c. Manajemen menetapkan dan mengembangkan aktivitas pengendalian terkait akuisisi, pengembangan, dan pemeliharaan teknologi dan infrastrukturnya, untuk mencapai tujuan Perseroan.
   d. Secara detail, pengendalian umum (*general control*) dan pengendalian aplikasi (*application control*) atas sistem informasi diatur dalam Kerangka Sistem Informasi Perseroan.
3. Implementasi Melalui Kebijakan dan Prosedur yang dilakukan dengan cara:
   a. Manajemen membentuk aktivitas pengendalian yang dibangun ke dalam proses bisnis dan aktivitas sehari-hari para pekerja, melalui kebijakan dan prosedur untuk mendukung pelaksanaan arahan manajemen.
   b. Manajemen membangun tanggung jawab dan akuntabilitas atas aktivitas pengendalian melalui personel yang ditunjuk dari unit bisnis atau fungsi, dengan risiko relevan berada.
   c. Manajemen menjamin bahwa pekerja yang kompeten dapat melaksanakan aktivitas pengendalian dengan tekun dan berkelanjutan.
   d. Manajemen memastikan kepada pekerja untuk melaksanakan aktivitas pengendalian secara tepat waktu sebagaimana yang ditetapkan dalam kebijakan dan prosedur;

- Segregation of responsibilities and duties for events and transactions to different employees relating to authorization, approval, processing and recording, payment or receipt of funds, reviews and audits, and asset storage and handling functions.
- The division of tasks to more than one employee is carried out systematically to ensure that there are checks and balances.
- Board of Directors establishes policies to reduce opportunities for collusion.

2. Establish and Develop General Controls on Technology
   Management understands and determines the dependencies and relationships between business processes, automated control activities, and general technology controls.
   a. Management establishes and develops control activities over the technology infrastructure, designed and implemented to help ensure the completeness, accuracy, and continuity of technology processes.
   b. Management establishes and develops control activities designed and implemented to limit technology access rights only to authorized users in accordance with their responsibilities and to protect the Company's assets from external and internal threats.
   c. Management establishes and develops control activities related to the acquisition, development, and maintenance of technology and infrastructure, to achieve the Company's objectives.
   d. In detail, general control and application control over the information system are regulated in the Company's Information System Framework.
3. Implementation through Policies and Procedures carried out by:
   a. Management establishes control activities that are built into business processes and daily activities of workers, through policies and procedures.
   b. Management establishes responsibility and accountability for control activities through designated personnel from the business unit or function, where the relevant risk is located.
   c. Management ensures that competent employees can carry out control activities diligently and continuously.
   d. Management ensures that workers carry out control activities in a timely manner as specified in policies and procedures.

e. Pekerja yang bertanggung jawab dapat melakukan investigasi dan merespon permasalahan yang teridentifikasi dari pelaksanaan aktivitas pengendalian;
f. Manajemen secara periodik mereviu aktivitas pengendalian untuk menilai relevansi dan keperluan pembaharuan saat diperlukan.

KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA

Dalam meningkatkan kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan, Perseroan memiliki Komite di bawah Direksi yaitu Komite Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan yang memiliki tugas memberikan opini atas kelengkapan dan kesesuaian atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dilakukan dengan Mempertimbangkan toleransi risiko yaitu manajemen mempertimbangkan tingkat risiko yang dapat diterima terkait pencapaian tujuan kepatuhan serta mempertimbangkan aturan dan hukum eksternal yaitu Hukum dan aturan merupakan standar minimal yang diintegrasikan ke dalam tujuan kepatuhan.

PELAKSANAAN IMPLEMENTASI INTERNAL CONTROL OVER FINANCIAL REPORTING (ICOFR)

Implementasi Internal Control over Financial Reporting (ICOFR) di PT Pelindo dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas ketentuan dalam SK-5/DKU.MBU/11/2024 yang mengatur penerapan sistem pengendalian internal yang memadai dan terintegrasi, khususnya dalam mendukung keandalan pelaporan keuangan. Kebijakan ini menjadi landasan utama bagi perusahaan dalam membangun kerangka kerja pengendalian yang sistematis, terdokumentasi, dan selaras dengan praktik tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

Sebagai tahap awal, PT Pelindo telah melaksanakan kegiatan kick-off implementasi ICOFR pada Februari 2025 sebagai bentuk komitmen manajemen dalam memastikan kesiapan organisasi. Selanjutnya, pada tanggal 14 Februari 2025, dilakukan kick-off pengembangan sekaligus implementasi aplikasi Pelindo ICOFR yang dirancang untuk mendukung proses identifikasi, dokumentasi, pengujian, dan pemantauan pengendalian internal secara lebih efektif dan terintegrasi.

Pada tahun 2025, implementasi ICOFR dilakukan pada entitas Pelindo Holding serta 12 entitas afiliasi. Pendekatan ini dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kompleksitas operasional dan kesiapan masing-masing entitas, sehingga diharapkan penerapan ICOFR dapat berjalan efektif, konsisten, dan memberikan nilai tambah dalam peningkatan kualitas pengendalian internal serta transparansi pelaporan keuangan di lingkungan PT Pelindo.

Ruang lingkup implementasi ICOFR di PT Pelindo mencakup area-area signifikan dalam pelaporan keuangan, yaitu Financial Reports, Expenditure, Revenue, Payroll, Fixed and Intangible Asset, serta Treasury. Cakupan ini ditetapkan berdasarkan tingkat materialitas dan risiko

e. Responsible workers can investigate and respond to problems identified from the implementation of control activities.
f. Management periodically reviews control activities to assess whether they are still relevant and can be updated if necessary.

COMPLIANCE WITH OTHER LEGAL REGULATIONS

In improving the Company's compliance with laws and regulations, the Company has a Committee under Board of Directors, namely Governance, Risk Management and Compliance Committee which has the task of providing opinions on the completeness and suitability of compliance with laws and regulations. Compliance with laws and regulations is carried out by considering risk tolerance, i.e. management considers the level of risk that can be management considers the acceptable level of risk related to achieving compliance objectives and considers external rules and laws i.e. Laws and rules are minimum standards that are integrated into compliance objectives.

IMPLEMENTATION OF INTERNAL CONTROL OVER FINANCIAL REPORTING (ICOFR)

The Internal Control over Financial Reporting (ICOFR) at PT Pelindo was implemented as a follow-up to the provisions of SK-5/DKU.MBU/11/2024, which regulates the implementation of an adequate and integrated internal control system, particularly to support the reliability of financial reporting. This policy serves as the primary foundation for the company in building a systematic, documented control framework aligned with good corporate governance practices.

As an initial step, PT Pelindo conducted ICOFR implementation kick off in February 2025, demonstrating Management's commitment to ensuring organizational readiness. Subsequently, on February 14, 2025, the kick off of the development and implementation of Pelindo ICOFR application, designed to support the identification, documentation, testing, and monitoring of internal controls in a more effective and integrated manner, was conducted.

In 2025, ICOFR implementation was carried out at Pelindo Holding and 12 affiliated entities. This phased approach was adopted by taking into account the operational complexity and readiness of each entity, with the expectation that the implementation of ICOFR can be executed effectively, consistently, and provide added value in improving the quality of internal control and transparency of financial reporting within PT Pelindo.

The scope of ICOFR implementation at PT Pelindo covers significant areas of financial reporting: Financial Reports, Expenditure, Revenue, Payroll, Fixed and Intangible Assets, and Treasury. This scope is determined based on the level of materiality and risks that could potentially affect the

yang berpotensi mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan, sehingga pengendalian yang dirancang dapat memberikan keyakinan memadai terhadap keandalan informasi keuangan.

Implementasi ICOFR di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Kantor Pusat terdapat 84 Business Process Model dan Risk Control Matrices atas Entity Level Contro, 56 Business Process Model dan Risk Control Matrices atas Transaction Level Control dan , 25 Business Process Model dan Risk Control Matrices atas IT General Control yang diajukan oleh Lini I. Laporan tindak lanjut dan implementasi ICOFR telah dikirimkan kepada Kementrian BUMN melalui surat Direktur Keuangan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) no KU.03.01/12/1/1/QUAS/KEUG/PLND-26 perihal Implementasi ICOFR tahun 2025 PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

INFORMASI DAN KOMUNIKASI (INFORMATION AND COMMUNCATION)

Direksi wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan inforrnasi (*Information and Communication*) keuangan maupun non-keuangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan tungsinya dalam waktu dan bentuk yang tepat untuk memudahkan pelaksanaan, pengendalian, dan pertanggungjawabannya.

Komponen Inforrnasi dan Komunikasi terdiri dari 3 (tiga) prinsip, yaitu:

1. Menggunakan Intormasi Relevan
   Perseroan memperoleh atau menghasilkan dan menggunakan informasi berkualitas, relevan untuk mendukung efektivitas komponen-komponen pengendalian internal yang dilakukan dengan:
   a. Mengidentifikasi informasi yang dibutuhkan
      Suatu proses dilaksanakan untuk mengidentifikasi informasi yang dibutuhkan dan diharapkan untuk mendukung efektivitas pengendalian internal dan pencapaian tujuan Perseroan.
   b. Mendapatkan data eksternal dan internal
      Sistem informasi dapat memperoleh data eksternal dan internal.
   c. Memproses data relevan menjadi informasi
      Sistem informasi memproses dan mengubah data relevan menjadi informasi.
   d. Memelihara kualitas selama proses berlangsung
      Sistem informasi menghasilkan informasi secara tepat waktu, terkini, akurat, lengkap, dapat diakses, terlindungi, dan dapat diverifikasi, serta dapat disimpan. Informasi direviu untuk menilai relevansinya dalam mendukung efektivitas pengendalian internal.
   e. Mempertimbangkan biaya dan manfaat
      Sifat, kuantitas, dan akurasi informasi disinkronkan dalam mendukung pencapaian tujuan Perseroan.

fair presentation of the Company's financial statements, ensuring that designed controls can provide reasonable assurance regarding the reliability of financial information.

The implementation of ICOFR at Head Office of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) includes 84 Business Process Models and Risk Control Matrices for Entity Level Control, 56 Business Process Models and Risk Control Matrices for Transaction Level Control and 25 Business Process Models and Risk Control Matrices for IT General Control submitted by Line I. The follow-up and implementation report of ICOFR has been sent to the Ministry of State-Owned Enterprises through a letter from the Director of Finance of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) no. KU.03.01/12/1/1/QUAS/KEUG/PLND-26 regarding the Implementation of ICOFR in 2025 at PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

INFORMATION & COMMUNICATION

Boards of Directors is required to identify, record, and communicate financial and non-financial information related to the implementation of their main duties and functions in a timely and appropriate form to facilitate implementation, control and accountability.

The Information and Communication component consists of 3 (three) principles, namely:

1. Using Relevant Information
   The Company obtains or generates and uses quality, relevant information to support the effectiveness of internal control components carried out with:
   a. Identify the information needed
      A process is implemented to identify the information needed and expected to support the effectiveness of internal control and the achievement of the Company's objectives.
   b. Obtain external and internal data
      Information systems can obtain external and internal data.
   c. Processing relevant data into information
      Information systems process and convert relevant data into information.
   d. Maintain quality throughout the process
      Information systems produce information that is timely, current, accurate, complete, accessible, protected, and verifiable, and can be stored. Information is reviewed to assess its relevance in supporting the effectiveness of internal control.
   e. Considering costs and benefits
      The nature, quantity, and accuracy of information are synchronized to support the achievement of the Company's objectives.

2. Komunikasi secara Internal
   Perseroan mengkomunikasikan informasi secara internal, termasuk tujuan dan tanggung jawab atas pengendalian internal, yang dibutuhkan untuk mendukung efektivitas pengendalian internal yang dilakukan dengan perincian sebagai berikut:
   a. Mengkomunikasikan pengendalian internal atas informasi ke para pekerja
      Untuk mengkomunikasikan informasi yang dibutuhkan agar para pekerja dapat memahami dan melaksanakan tanggung jawab pengendalian internal mereka.
   b. Mengkomunikasikan dengan Dewan Komisaris
      Terdapat komunikasi antara manajemen/Direksi dan Dewan Komisaris, sehingga mereka memiliki informasi yang dibutuhkan untuk memenuhi peran mereka dalam mencapai tujuan Perseroan.
   c. Menyediakan garis komunikasi yang terpisah sebagai *fail safe mechanisms* untuk dijalankan sebagai komunikasi anonim atau rahasia ketika jalur normal tidak beroperasi atau tidak efektif. Seperti saluran khusus *whistleblower*.
   d. Menetapkan metode komunikasi relevan dengan mempertimbangkan waktu, audiens/ pendengar, dan dan sifat informasi.
3. Komunikasi secara Eksternal
   Perseroan mengkomunikasikan dengan pihak eksternal terkait dengan hal-hal yang mempengaruhi efektivitas pengendalian internal yang dilakukan dengan cara:
   a. Komunikasi dengan pihak eksternal
      Suatu proses diterapkan untuk mengkomunikasikan informasi relevan dan secara tepat waktu ke pihak eksternal termasuk pemegang saham, partner, pemilik, pemerintah, konsumen, analis keuangan, serta pihak eksternal lainnya.
   b. Memudahkan komunikasi masuk
      Jalur komunikasi terbuka memudahkan input dari konsumen, pemasok, auditor eksternal, pemerintah, analis keuangan, dan lainnya, untuk menyediakan informasi relevan bagi manajemen/ Direksi dan Dewan Komisaris.
   c. Menyediakan garis komunikasi yang terpisah
      Jalur komunikasi terpisah diterapkan sebagai *fail safe mechanisms* untuk dijalankan sebagai komunikasi anonim atau rahasia ketika jalur normal tidak beroperasi atau tidak efektif. Seperti saluran khusus *whistleblower*.
   d. Komunikasi dengan Dewan Komisaris
      Informasi relevan dihasilkan dari penilaian yang dilakukan oleh pihak eksternal dikomunikasikan kepada manajemen/Direksi dan Dewan Komisaris.

   e. Menetapkan metode komunikasi
      Metode komunikasi mempertimbangkan waktu, audiens/pendengar, sifat komunikasi, serta ketentuan perjanjian dan aturan pemerintah.

2. Internal Communication
   The Company communicates information internally, including the objectives and responsibilities for internal control, which is needed to support the effectiveness of internal control carried out with the following details:

   a. Communicating internal control over information to employees
      To communicate the information needed for employees to understand and carry out their internal control responsibilities.

   b. Communicating with the Board of Commissioners
      There is communication between the management/ Board of Directors and the Board of Commissioners, so that they have the information needed to fulfill their role in achieving the Company's goals.
   c. Provide separate lines of communication as fail safe mechanisms to run as anonymous or confidential communication when normal lines are not operational or ineffective. Such as a dedicated whistleblower channel.
   d. Establish relevant communication methods by considering the time, audience/listener, and nature of the information.
3. External Communication The Company communicates with external parties regarding matters that affect the effectiveness of internal control by means of:

   a. Communication with external parties
      A process is implemented to communicate relevant and timely information to external parties including shareholders, partners, owners, governments, consumers, financial analysts and other external parties.
   b. Facilitate incoming communication
      Open lines of communication facilitate input from consumers, suppliers, external auditors, government, financial analysts, and others, to provide relevant information to management/Board of Directors and the Board of Commissioners.
   c. Provide a separate line of communication
      Separate communication lines are implemented as fail safe mechanisms to operate as anonymous or confidential communications when normal lines are inoperative or ineffective. Like a special whistleblower channel.
   d. Communication with the Board of Commissioners
      Relevant information generated from the assessment carried out by external parties is communicated to the management/Board of Directors and the Board of Commissioners.
   e. Establish communication methods
      The communication method takes into account the timing, audience, nature of communication, as well as the terms of agreement and government regulations.

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan Evaluasi adalah proses menilai kualitas Sistem Pengendalian Intern Perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan melalui:

1. Melakukan Evaluasi Berkelanjutan dan/atau Terpisah
   Perseroan menetapkan, mengembangkan, dan melaksanakan evaluasi berjalan dan/atau terpisah untuk meyakinkan bahwa pengendalian internal telah didesain secara memadai dan efektif.
   a. Mempertimbangkan bauran evaluasi berkelanjutan dan terpisah.
   b. Mengembangkan pemahaman titik awal.
   c. Desain dan kondisi saat ini dari Sistem Pengendalian Internal digunakan untuk membangun titik awal untuk evaluasi berkelanjutan dan terpisah.
   d. Mempertimbangkan tingkat perubahan.
   e. Manajemen mempertimbangkan tingkat perubahan dalam proses bisnis ketika menetapkan dan mengembangkan evaluasi berkelanjutan dan terpisah.
   f. Menggunakan pekerja yang kompeten.
   g. Evaluator yang melaksanakan evaluasi berkelanjutan dan terpisah memiliki pengetahuan yang cukup untuk memahami apa yang sedang dievaluasi.
   h. Terintegrasi dengan proses bisnis.
   i. Evaluasi berjalan dibangun dalam proses bisnis dan disesuaikan dengan perubahan kondisi.
   j. Evaluasi obyektif dilakukan secara terpisah dan periodik untuk memberikan masukan yang objektif.
   k. Menyesuaikan lingkup dan frekuensi.
   l. Manajemen menyesuaikan lingkup dan frekuensi evaluasi terpisah, tergantung pada risiko.
2. Evaluasi dan Komunikasi Kelemahan Pengendalian Intern kepada para pihak yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan perbaikan, termasuk Direksi dan Dewan Komisaris melalui:
   a. Penilaian hasil evaluasi berkelanjutan dan terpisah oleh Direksi dan Dewan Komisaris.
   b. Mengkomunikasikan kelemahan kepada manajemen kepada pihak yang bertanggung jawab untuk dilakukan perbaikan dan dapat disampaikan kepada manajemen senior.
   c. Melaporkan kelemahan signifikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
   d. Memonitor tindakan perbaikan oleh manajemen.

KESESUAIAN DENGAN COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS OF TRADEWAY COMMISSION (COSO)

Sistem Pengendalian Internal Perseroan telah mengacu ke COSO Internal Control Integrated Framework Kerangka konseptual pengendalian internal COSO sebagai kerangka kerja yang komprehensif untuk mengukur efektivitas pengendalian internal terdiri dari 5 (lima) komponen, yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*);

MONITORING AND EVALUATION

Monitoring and Evaluation is the process of assessing the quality of the Company's Internal Control System within a certain period of time. Monitoring and evaluation is carried out through:

1. Conduct Continuous and/or Separate Evaluations
   The Company establishes, develops, and carries out ongoing and/or separate evaluations to ensure that internal controls have been designed adequately and effectively.
   a. Consider a mix of ongoing and separate evaluations
   b. Develop an understanding of starting point.
   c. The design and running state of the Internal Control System is used to establish a starting point for ongoing and separate evaluations.
   d. Consider the rate of change.
   e. Management considers the degree of change in business processes when establishing and developing ongoing and separate evaluations.
   f. Using competent workers.
   g. Evaluators who carry out ongoing and separate evaluations have sufficient knowledge to understand what is being evaluated.
   h. Integrated with business processes.
   i. Ongoing evaluation is built into business processes and adapted to changing conditions.
   j. Evaluation objectively Separate evaluations are carried out periodically to provide objective input.
   k. Adjust the scope and frequency
   l. Management adjusts the scope and frequency of separate evaluations, depending on the risk.
2. Evaluation and Communication of Internal Control Weaknesses to the parties responsible for taking corrective action, including Board of Directors and Board of Commissioners through:
   a. Assessment of the results of continuous and separate evaluations by Board of Directors and Board of Commissioners.
   b. Communicating weaknesses to management to the responsible party for improvement and can be conveyed to senior management.
   c. Reporting significant weaknesses to Board of Directors and Board of Commissioners.
   d. Monitor corrective actions by management.

COMPLIANCE WITH THE COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS OF TREADWAY COMMISSION (COSO)

The Company's Internal Control System has referred to the COSO Internal Control Integrated Framework. The COSO internal control conceptual framework as a comprehensive framework for measuring the effectiveness of internal control consists of 5 (five) components:

1. Control Environment;

2. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*);
3. Kegiatan Pengendalian (*Control Activites*);
4. Informasi dan Komunikasi (*Information & Communication*);
5. Pemantauan dan Evaluasi (*Monitoring*).

EVALUASI PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Satuan Pengawasan Intern (SPI) telah mengevaluasi efektivitas Sistem Pengendalian Internal. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai reliabilitas Sistem Pengendalian Internal Perseroan serta konsistensi implementasinya. Evaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal telah dilaksanakan pada tahun 2025 oleh pihak eksternal yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangungan (BPKP) berdasarkan Surat Tugas Direktur Pengawasan Badan Usaha Konektivitas dan Pariwisata Nomor PE.12.02/ST-205/D502/1/2025 tanggal 21 November 2025, melalui pendekatan *Quality Assurance Review* (QAR) untuk tahun buku 2024.

Penilaian Kualitas SPI/*Quality Assurance Review* (QAR) Korporasi pada SPI PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Tahun 2025 dilaksanakan dengan ruang lingkup mencakup Penilaian Kesesuaian terhadap Standar (*Conformity*) dan Penilaian Maturitas SPI Korporasi (*Maturity*). Hasil penilaian kesesuaian terhadap standar (*conformity*) menunjukkan bahwa fungsi audit intern PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Tahun Buku 2024 yang dilaksanakan pada tahun 2025 telah berada pada fase Pencapaian Umum. Hasil penilaian Maturitas SPI Korporasi (Maturity) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) menunjukan nilai 2,93.

PERNYATAAN DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS ATAS KECUKUPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Satuan Pengawasan Inten selanjutnya disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk telaah dan *monitoring* atas pelaksanaan sistem pengendalian internal Perseroan. Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian internal Perseroan pada tahun 2025, Direksi dan Dewan Komisaris menyatakan bahwa sistem pengendalian internal secara keseluruhan telah berjalan memadai.

MANAJEMEN RISIKO

Manajemen risiko merupakan salah satu elemen penting dalam menjalankan bisnis perusahaan karena semakin berkembangnya dunia perusahaan serta meningkatnya kompleksitas aktivitas perusahaan mengakibatkan meningkatnya tingkat eksposur risiko yang dihadapi perusahaan. Sasaran utama dari implementasi manajemen risiko adalah melindungi dan menciptakan nilai perusahaan. Perusahaan mengelola risiko dengan menyeimbangkan antara strategi bisnis dengan pengelolaan risikonya sehingga perusahaan akan mendapatan hasil optimal dari operasionalnya.

2. Risk Assessment;
3. Control Activities;
4. Information and Communication;
5. Monitoring and Evaluation.

EVALUATION OF INTERNAL CONTROL SYSTEM IMPLEMENTATION

The Internal Audit Unit (SPI) has evaluated the effectiveness of the Internal Control System. This evaluation aims to assess the reliability of the Company's Internal Control System as well as the consistency of its implementation. The evaluation of internal control system implementation was carried out in 2025 by an external party, namely the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP), based on the Assignment Letter of the Director of Supervision for Connectivity and Tourism State-Owned Enterprises No. PE.12.02/ST-205/D502/1/2025 dated November 21, 2025, using the Quality Assurance Review (QAR) approach for the 2024 financial year.

The Corporate SPI Quality Assessment/Quality Assurance Review (QAR) at the Internal Audit Unit of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) for 2025 was conducted with a scope covering Conformity Assessment against Standards and Corporate SPI Maturity Assessment. The results of conformity assessment indicate that the internal audit function of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) for the 2024 fiscal year, conducted in 2025, has reached the General Achievement phase. The results of the Corporate SPI Maturity Assessment for PT Pelabuhan Indonesia (Persero) show a score of 2.93.

STATEMENT OF BOARD OF DIRECTORS AND/OR BOARD OF COMMISSIONERS ON THE ADEQUACY OF INTERNAL CONTROL SYSTEM

The evaluation results conducted by the Internal Audit Unit were subsequently submitted to the Board of Directors and Board of Commissioners for review and monitoring of the implementation of the Company's internal control system. Based on the evaluation results of the Company's internal control system in 2025, the Board of Directors and Board of Commissioners stated that the internal control system, as a whole, has been adequately implemented.

RISK MANAGEMENT

Risk management is a key element in running the Company's business, as the continuous development of corporate environment and increasing complexity of business activities lead to higher levels of risk exposure. The primary objective of implementing risk management is to protect and create corporate value. The Company manages risks by balancing its business strategy with risk management practices, enabling it to achieve optimal results from its operations.

Pelindo menerapkan manajemen risiko yang mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara. Sebagai tindak lanjut atas terbitnya PER-2 tersebut, perusahaan telah menerbitkan Peraturan Direksi Nomor HK.01/8/9/1/UTMA/PLND-23, tanggal 8 September 2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Disamping itu Kementerian BUMN juga telah menerbitkan petunjuk teknis seperti SK-3/DKU.MBU/05/2023 Petunjuk teknis komposisi dan kualifikasi organ pengelola risiko, SK-6/DKU.MBU/10/2023 Petunjuk teknis proses manajemen risiko dan agregrasi pada taksonomi risiko portofolio, SK-7/DKU.MBU/10/2023 Petunjuk teknis pelaporan manajemen risiko, SK-8/DKU.MBU/12/2023 Petunjuk teknis penilaian indeks kematangan risiko (*risk maturity index*), sebagai tindak lanjut dari petunjuk teknis tersebut maka perusahaan menerbitkan peraturan direksi tentang Pedoman teknis manajemen risiko.

STRUKTUR KOORDINASI DAN KOMUNIKASI

Dalam implementasi manajemen risiko diperlukan struktur koordinasi dan komunikasi yang efektif, sehingga fungsi perintah koordinasi, pelaksanaan dan pelaporan terpetakan dengan jelas. Struktur koordinasi dan komunikasi serta pengelolaan manajemen risiko digambarkan sebagai berikut.

Pelindo implements risk management in accordance with the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines on Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises. As a follow-up to the issuance of this regulation, the Company has enacted Board of Directors Regulation No. HK.01/8/9/1/UTMA/PLND-23 dated September 8, 2023 regarding the Implementation of Risk Management within PT Pelabuhan Indonesia (Persero). In addition, the Ministry of State-Owned Enterprises has also issued several technical guidelines, including SK-3/DKU.MBU/05/2023 on the composition and qualifications of risk management organs, SK-6/DKU.MBU/10/2023 on risk management processes and aggregation within portfolio risk taxonomy, SK-7/DKU.MBU/10/2023 on risk management reporting, and SK-8/DKU.MBU/12/2023 on risk maturity index assessment. As a follow-up to these technical guidelines, the Company has issued a Board of Directors regulation concerning Technical Guidelines for Risk Management.

COORDINATION AND COMMUNICATION STRUCTURE

The risk management requires an effective coordination and communication structure, so that the functions of coordination, implementation and reporting are clearly mapped. The structure of coordination and communication and risk management is described as follows.

Struktur Koordinasi & Komunikasi Manajemen Risiko
Structure of Coordination and Communication Risk Management

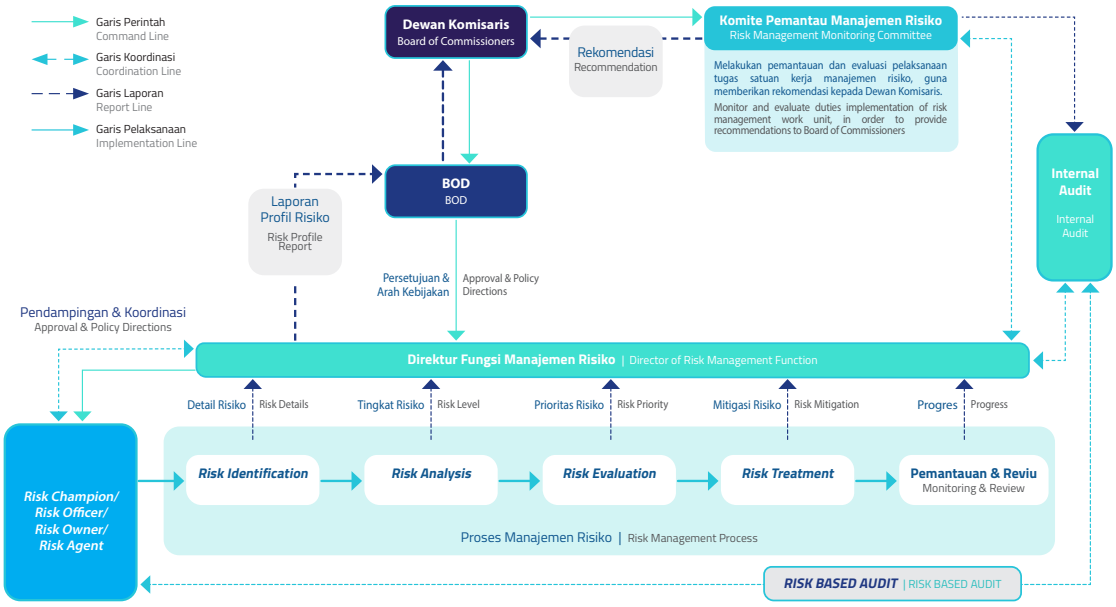

ARSITEKTUR MANAJEMEN RISIKO

Pelindo telah mengadopsi standar arsitektur manajemen risiko berbasis ISO 31000:2018 *Risk Management Guidelines*, yang terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu Prinsip, Kerangka Kerja dan Proses Manajemen Risiko.

RISK MANAGEMENT ARCHITECTURE

Pelindo has adopted the risk management architecture standard based on ISO 31000:2018 Risk Management Guidelines, which consists of 3 (three) parts, namely Principles, Framework and Risk Management Process.

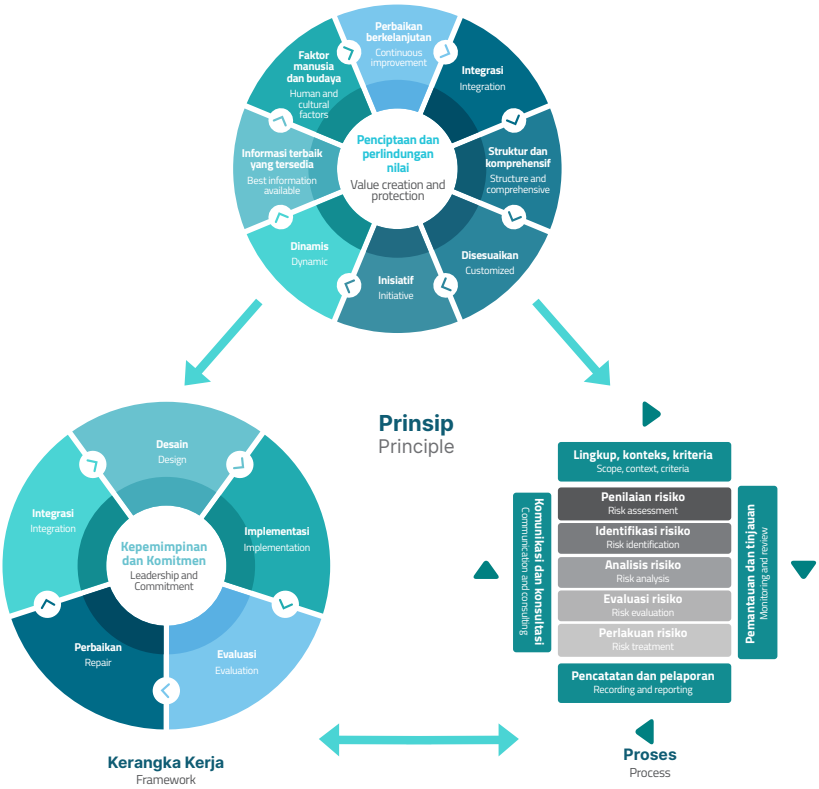

KOMPOSISI DAN KUALIFIKASI ORGAN PENGELOLA RISIKO

Pelindo telah mengadopsi standar fungsi Organ Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 PER-2/03/MBU/2023 dilakukan secara terpisah dalam rangka penerapan model tata kelola risiko tiga lini (three lines model) sebagaimana dimaksud dalam Diagram berikut:

RISK MANAGEMENT ORGAN COMPOSITION AND QUALIFICATIONS

Pelindo has adopted the Risk Management Organ function standard as referred to in Article 55 PER-2/03/MBU/2023, which is carried out separately in the context of implementing the three-line risk governance model as referred to in the following Diagram:

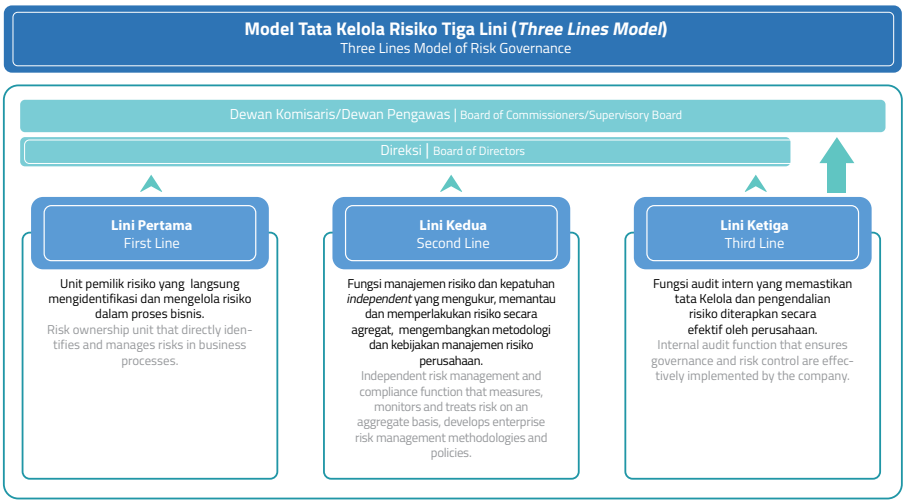

PROSES MANAJEMEN RISIKO

Proses manajemen risiko yang diterapkan oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) sudah mengacu pada Petunjuk Teknis No. SK-6/DKU.MBU/10/2023

RISK MANAGEMENT PROCESS

The risk management process implemented by PT Pelabuhan Indonesia (Persero) has referred to the Technical Guidelines No. SK-6/DKU.MBU/10/2023.

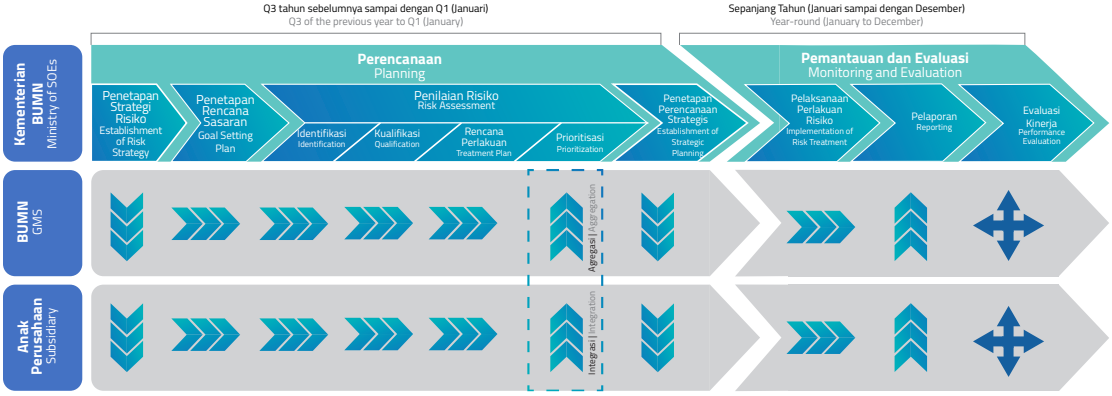

1. Proses Perencanaan yang meliputi :
   a. Proses penetapan strategi risiko
   b. Proses penetapan rencana sasaran
   c. Proses penilaian risiko yang terdiri dari identifikasi risiko, kuantifikasi riisiko, rencana perlakuan risiko dan prioritisasi risiko
   d. Proses penetapan perencanaan strategis
2. Proses pemantauan dan evaluasi yang meliputi :
   a. Proses pemantaian dan evalluasi atas pelaksanaan perlakuan risiiko
   b. Proses pelaporan yang meliputi laporan penerapan manajemen risiko, laporan audit intern dan laporan tata kelola terintegrasi
   c. Proses evaluasi kinerja

PROSES PERENCANAAN MANAJEMEN RISIKO

1. Penetapan Strategi Risiko
   a. Strategi Risiko Portofolio
      - Kementerian BUMN menetapkan kebijakan strategi Risiko Portofolio Perseroan dalam rangka menciptakan dan melindungi nilai Perseroan.
      - Strategi Risiko Portofolio Perseroan dimuat dalam peta jalan (*roadmap*) Perseroan dan menjadi acuan bagi Perseroan dalam menyusun RJP.
      - Strategi Risiko Portofolio Perseroan dituangkan dalam pernyataan Selera Risiko (*Risk Appetite Statement*/RAS) Kementerian BUMN.
      - Kebijakan strategi Risiko Portofolio Perseroan setiap tahunnya dijabarkan dalam dokumen Aspirasi Pemegang Saham yang ditetapkan oleh Menteri BUMN untuk menjadi acuan bagi BUMN dalam menyusun RKAP.
      - RAS Kementerian BUMN meliputi namun tidak terbatas pada Taksonomi Risiko Portofolio BUMN, tujuan pendirian Perseroan sesuai dengan perundang-undangan dan *core value* yang harus dijaga Perseroan.
   b. Strategi Risiko
      - Perseroan wajib menyusun Strategi Risiko sebelum menyusun rencana strategi bisnis.

1. Planning Process which includes:
   a. Risk strategy determination process
   b. The process of establishing a target plan
   c. Risk assessment process consisting of risk identification, risk quantification, risk treatment plan and risk prioritization.
   d. The process of establishing strategic planning
2. Monitoring and evaluation process which includes:
   a. The process of monitoring and evaluation of the implementation of risk treatment
   b. Reporting process which includes risk management implementation report, internal audit report and integrated governance report.
   c. Performance evaluation process

RISK MANAGEMENT PLANNING PROCESS

1. Determination of Risk Strategy
   a. Portfolio Risk Strategy
      - The Ministry of SOEs determines the Company's Portfolio Risk strategy policy in order to create and protect the Company's value.
      - The Company's Portfolio Risk Strategy is contained in the Company's roadmap and becomes a reference for the Company in preparing the RJP.
      - The Company's Portfolio Risk Strategy is outlined in the Ministry of SOEs' Risk Appetite Statement (RAS).
      - The Company's Portfolio Risk strategy policy is outlined annually in the Shareholders' Aspiration document stipulated by the Minister of SOEs to become a reference for SOEs in preparing the RKAP.
      - The RAS of the Ministry of SOEs includes but is not limited to the SOE Portfolio Risk Taxonomy, the purpose of establishing the Company in accordance with the laws and the core values that must be maintained by the Company.
   b. Risk Strategy
      - The Company is required to prepare a Risk Strategy before preparing a business strategy plan.

- Penyusunan Strategi Risiko BUMN mempertimbangkan:
  - » RAS Kementerian BUMN;
  - » Core competence perusahaan;
  - » Outlook industri dan positioning Perseroan pada industri;
  - » Kondisi perusahaan pada tahun berjalan dalam survival mode (kontraksi), business as usual, atau expansion mode;
  - » Cakupan waktu penetapan target perusahaan dalam RJP atau RKAP; dan
  - » Kapasitas Risiko perusahaan.
- Strategi Risiko Perseroan terdiri dari: (i) pernyataan selera Risiko (*risk appetite statement*) Perseroan dengan memperhatikan selera Risiko Kementerian BUMN, (ii) nilai ambang Risiko di level enterprise/korporat yang memuat *risk capacity, risk appetite, risk tolerance*, dan *risk limit*, serta (iii) metrik strategi Risiko.
- Perseroan dapat menggunakan 4 (empat) Sikap Terhadap Risiko
- Perseroan wajib melakukan perhitungan nilai ambang Risiko di level *enterprise*/ korporat secara handal dan dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan nilai yang paling optimal bagi Perseroan
- Penyusunan metrik strategi Risiko memuat paling sedikit: (i) kategori Risiko, (ii) sikap terhadap Risiko, (iii) parameter dan satuan ukur, (iv) nilai batasan/limit.
- Total nilai batasan/limit dalam metrik strategi Risiko secara kuantifikasi tidak boleh melebihi nilai batasan Risiko *(risk limit)* di level *enterprise*/ korporat.
- Metrik strategi Risiko wajib digunakan sebagai dasar dalam menetapkan berbagai pilihan sasaran dan strategi yang akan menjadi usulan dalam rancangan RKAP.
- Strategi Risiko Perseroan wajib mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sebelum dijadikan sebagai pedoman Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan dalam penyusunan strategi bisnis baik RJP ataupun RKAP.

2. Penetapan Rencana Sasaran
   a. Sasaran Perseroan wajib disusun berbasis manajemen risiko.
      - Pilihan berbagai sasaran dan strategi bisnis diputuskan berdasarkan pertimbangan antara Risiko yang dapat diterima sesuai dengan nilai ambang Risiko yang telah ditetapkan dengan hasil yang diharapkan dapat diperoleh perusahaan.
      - Pertimbangan Risiko yang dapat diterima mengikuti acuan strategi Risiko yang telah ditetapkan.

- The preparation of the SOE Risk Strategy takes into account:
  - » RAS of the Ministry of SOEs;
  - » Core competencies of the Company;
  - » Industry outlook and the Company's positioning in the industry;
  - » The Company's conditions in the current year in survival mode (contraction), business as usual, or expansion mode;
  - » Time scope for determining the Company's targets in the RJP or RKAP; and
  - » The Company's risk capacity.
- The Company's Risk Strategy consists of: (i) the Company's risk appetite statement by taking into account the Ministry of SOEs' risk appetite, (ii) the risk threshold value at the enterprise/ corporate level which contains risk capacity, risk appetite, risk tolerance, and risk limit, and (iii) risk strategy metrics.
- The Company can use 4 (four) Attitudes Towards Risk
- The Company is required to calculate the risk threshold value at the enterprise/corporate level reliably and responsibly and provide the most optimal value for the Company
- The preparation of risk strategy metrics contains at least: (i) risk category, (ii) attitude towards risk, (iii) parameters and units of measurement, (iv) limit value.
- The total value of the limit in the Risk strategy metric must not exceed the Risk limit value at the enterprise/corporate level.
- The Risk strategy metric must be used as a basis for determining various target and strategy options that will be proposed in the draft RKAP.
- The Company's Risk Strategy must obtain approval from the Board of Commissioners/ Supervisory Board before being used as a guideline for the Company and the Company's Subsidiaries in preparing business strategies, both RJP and RKAP.

2. Determination of Target Plans
   a. The Company's targets must be prepared based on risk management.
      - The choice of various business targets and strategies is decided based on considerations between acceptable Risks according to the predetermined Risk threshold value and the results that the company expects to obtain.
      - Consideration of acceptable Risks follows the established Risk strategy reference.

- Target yang diusulkan dalam rancangan perencanaan strategis memenuhi ketentuan

b. Sasaran Usaha
   - Sasaran usaha disusun secara spesifik, dapat diukur, jelas jangka waktunya serta secara rasional dapat dilaksanakan/dicapai.
   - Dalam penyusunan sasaran usaha, Perseroan wajib berpedoman pada sasaran utama Kementerian BUMN

c. Strategi Usaha
   - Strategi usaha harus disusun sebagai langkah yang ditempuh untuk mencapai atau merealisasikan sasaran usaha perusahaan.
   - Kelayakan suatu strategi yang akan digunakan dalam merealisasikan suatu sasaran usaha yang hendak dicapai, dilakukan penilaian berdasarkan metrik strategi Risiko.
   - Untuk menjalankan strategi usaha yang telah dinilai layak berdasarkan strategi Risiko dijabarkan dalam program kegiatan perusahaan berdasarkan bidang kegiatan yang tidak terbatas pada kegiatan pemasaran dan penjualan, pengadaan, produksi dan kualitas produk, teknis dan teknologi, keuangan dan akuntansi, sistem dan organisasi, pengembangan SDM, penelitian dan pengembangan, pelestarian lingkungan, investasi, atau kegiatan lainnya.

d. Pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Biaya serta Proyeksi Laporan Keuangan
   Perencanaan atas sasaran dan strategi termasuk meliputi pengalokasian anggaran pendapatan dan biaya serta proyeksi laporan keuangan. Penyusunan anggaran pendapatan harus selaras dengan sasaran dan strategi yang telah disesuaikan dengan strategi Risiko.

e. Perencanaan Audit Intern
   Dalam rancangan RKAP wajib dilengkapi dengan perencanaan Audit Intern sebagai bagian dari bab Manajemen Risiko.

f. Perencanaan Tata Kelola Terintegrasi

3. Penilaian Risiko
   Berdasarkan sasaran yang ditetapkan, Perseroan wajib melakukan penilaian Risiko yang terdiri dari proses identifikasi Risiko, kuantifikasi Risiko, rencana perlakuan Risiko, dan prioritisasi Risiko.

   a. Identifikasi risiko
      - Identifikasi Risiko dilakukan oleh masing-masing pemilik Risiko selaku Lini Pertama dengan berkoordinasi atau berkonsultasi kepada fungsi Manajemen Risiko selaku Lini Kedua.
      - Setiap sasaran dan strategi wajib dilakukan identifikasi Risiko.
      - Profil Risiko hasil identifikasi disajikan paling sedikit memuat: i) sasaran, (ii) strategi, (iii) taksonomi Risiko, (iv) peristiwa Risiko, (v) penyebab Risiko, (vi) Key Risk Indicator (KRI), (vii) threshold KRI dalam 3 (tiga) kategori yaitu batas bahaya, batas hati-hati, dan batas aman

- The targets proposed in the strategic planning draft meet the provisions

b. Business Targets
   - Business targets are prepared specifically, can be measured, have a clear time frame and can be implemented/achieved rationally.
   - In preparing business targets, the Company must refer to the main targets of the Ministry of SOEs

c. Business Strategy
   - Business strategy must be formulated as steps taken to achieve or realize the company's business targets.
   - The feasibility of a strategy to be used in realizing business target to be achieved is assessed based on the Risk strategy metric.
   - To implement a business strategy that has been assessed as feasible based on the Risk strategy, it is outlined in the company's activity program based on areas of activity that are not limited to marketing and sales activities, procurement, production and product quality, technical and technology, finance and accounting, systems and organizations, HR development, research and development, environmental conservation, investment, or other activities.

d. Allocation of Revenue and Cost Budget and Financial Report Projection
   Planning for targets and strategies includes the allocation of revenue and cost budget and financial report projection. The preparation of the revenue budget must be in line with the targets and strategies that have been adjusted to the Risk strategy.

e. Internal Audit Planning
   The draft RKAP must be accompanied by Internal Audit planning as part of the Risk Management chapter.

f. Integrated Governance Planning

3. Risk Assessment
   Based on the targets set, the Company is required to conduct a Risk assessment consisting of Risk identification process, Risk quantification, Risk treatment plan, and Risk prioritization.

   a. Risk identification
      - Risk identification is carried out by each Risk owner as the First Line by coordinating or consulting with the Risk Management function as the Second Line.
      - Every target and strategy must undergo Risk identification.
      - The Risk Profile resulting from the identification is presented containing at least: i) targets, (ii) strategies, (iii) Risk taxonomy, (iv) Risk events, (v) causes of Risk, (vi) Key Risk Indicators (KRI), (vii) KRI thresholds in 3 (three) categories, namely danger limits, caution limits, and

sebagai early warning signal, (viii) kontrol saat ini (existing control) dan penilaian efektivitas kontrol, (ix) dampak Risiko, dan (x) perkiraan waktu terjadinya eksposur Risiko.

- Peristiwa Risiko yang diidentifikasi dikelompokkan berdasarkan Taksonomi Risiko Perseroan dan disesuaikan dengan kegiatan usaha perusahaan.
- Melakukan identifikasi penyebab Risiko.
- Identifikasi KRI
- Identifikasi kontrol/pengendalian yang telah ada (control existing)
- Penilaian efektivitas kontrol/pengendalian
- Dampak Risiko diidentifikasi berdasarkan 2 (dua) kategori yaitu: (i) dampak kuantitatif, atau (ii) dampak kualitatif. Masing-masing kategori dampak tersebut diberikan deskripsi yang menjelaskan dampak yang akan dihadapi atau diterima oleh perusahaan atas suatu Risiko.
- Perkiraan waktu terjadinya eksposur Risiko diidentifikasi berdasarkan waktu bagi perusahaan akan terpapar dengan suatu Risiko. Perkiraan waktu tersebut didasarkan atas pertimbangan data historis, proyeksi lingkungan yang mempengaruhi, atau keumuman sesuai dengan Risiko yang melekat pada industri.

b. Kuantifikasi Risiko

- Seluruh Risiko yang telah diidentifikasi dilakukan kuantifikasi Risiko yang terdiri dari: (i) kuantifikasi Risiko Inheren, dan (ii) kuantifikasi Risiko Residual.
- Masing-masing kuantifikasi Risiko meliputi: (i) Eksposur Risiko, (ii) Skala Risiko, dan (iii) Level Risiko.
- Perhitungan Eksposur Risiko
- Perhitungan untuk menentukan nilai Dampak dan nilai Probabilitas
- Perhitungan Skala Risiko
- Perhitungan Level Risiko diperoleh berdasarkan hasil pemetaan antara Skala Dampak dengan Skala Risiko
- Hasil kuantifikasi Risiko Inheren disajikan paling sedikit memuat: (i) asumsi perhitungan dampak, (ii) nilai dampak rupiah atau mata uang fungsional pembukuan untuk Risiko Kuantitatif atau nilai skor Risiko untuk Risiko Kualitatif, (iii) skala dampak, (iv) skala probabilitas, (v) Eksposur Risiko, (vi) Skala Risiko, dan (vii) Level Risiko.
- Hasil kuantifikasi Risiko Residual disajikan paling sedikit memuat: (i) nilai dampak tiap triwulan, (ii) skala dampak tiap triwulan, (iii) nilai probabilitas tiap triwulan, (iv) skala probabilitas tiap triwulan, (v) Eksposur Risiko tiap triwulan untuk Risiko Kuantitatif, (vi) Skala Risiko tiap triwulan, dan (vii) Level Risiko tiap triwulan

c. Rencana Perlakuan Risiko

- Perseroan menyusun rencana perlakuan Risiko dan mengalokasikan anggaran yang memadai

safety limits as early warning signals, (viii) existing controls and assessment of control effectiveness, (ix) Risk impacts, and (x) estimated time of Risk exposure.

- Identified Risk events are grouped based on the Company's Risk Taxonomy and adjusted to the company's business activities.
- Identifying the causes of Risk.
- KRI Identification
- Identification of existing controls
- Assessment of control effectiveness
- Risk impacts are identified based on 2 (two) categories, namely: (i) quantitative impacts, or (ii) qualitative impacts. Each impact category is given a description that explains the impact that will be faced or received by the company for a Risk.
- Estimated time of Risk exposure is identified based on the time the company will be exposed to a Risk. The estimated time is based on consideration of historical data, projections of influencing environment, or generality according to the Risk inherent in the industry.

b. Risk Quantification

- All identified Risks are subject to Risk quantification consisting of: (i) Inherent Risk quantification, and (ii) Residual Risk quantification.
- Each Risk quantification includes: (i) Risk Exposure, (ii) Risk Scale, and (iii) Risk Level.
- Risk Exposure Calculation
- Calculation to determine Impact value and Probability value
- Risk Scale Calculation
- Risk Level Calculation is obtained based on mapping results between Impact Scale and Risk Scale
- Inherent Risk quantification results are presented containing at least: (i) impact calculation assumptions, (ii) rupiah impact value or functional accounting currency for Quantitative Risk or Risk score value for Qualitative Risk, (iii) impact scale, (iv) probability scale, (v) Risk Exposure, (vi) Risk Scale, and (vii) Risk Level.
- Residual Risk quantification results are presented containing at least: (i) impact value each quarter, (ii) impact scale each quarter, (iii) probability value each quarter, (iv) probability scale each quarter, (v) Risk Exposure each quarter for Quantitative Risk, (vi) Risk Scale each quarter, and (vii) Risk Level each quarter

c. Risk Treatment Plan

- The Company prepares a Risk treatment plan and allocates an adequate budget to reduce

untuk menurunkan nilai Risiko sesuai dengan target nilai Risiko Residual.

- Informasi rencana perlakuan Risiko paling sedikit memuat antara lain: (i) opsi perlakuan Risiko, (ii) kegiatan rencana perlakuan Risiko, (iii) jenis program kegiatan di dalam RKAP, (iv) output kegiatan perlakuan Risiko, (v) anggaran biaya kegiatan perlakuan Risiko, (vi) pejabat yang bertanggungjawab, dan (vii) timeline pelaksanaan kegiatan perlakuan Risiko.
- Opsi perlakuan Risiko dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan hasil perhitungan Level Risiko sebagaimana kriteria pemilihan opsi perlakuan Risiko.
- Rencana penyusunan perlakuan Risiko

d. Prioritisasi Risiko

- Proses Integrasi Risiko

  BUMN melakukan proses integrasi Risiko terhadap seluruh Risiko yang telah dilakukan penilaian Risiko baik yang berasal dari anak perusahaan BUMN atau unit Lini Pertama dari BUMN Induk. Tujuan integrasi Risiko untuk memperoleh daftar Risiko Utama yang akan dicantumkan dalam rancangan perencanaan strategis baik RJP atau RKAP serta akan dilakukan pemantauan dan evaluasi pada level enterprise.
- Proses Agregasi Risiko

  Bersamaan dengan penyampaian usulan perencanaan strategis berbasis Risiko baik RJP atau RKAP, Perseroan menyampaikan kertas kerja hasil perhitungan nilai ambang strategi Risiko, hasil penilaian Risiko, dan hasil integrasi Risiko kepada Kementerian BUMN.

4. Penetapan Perencanaan Strategis

   Direksi menyampaikan usulan perencanaan strategis Perseroan baik RJP atau RKAP yang telah disusun berbasis Risiko kepada Dewan Komisaris. Usulan perencanaan strategis berbasis Risiko telah memperhitungkan biaya perlakuan Risiko dan target Eksposur Risiko Residual. Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap usulan perencanaan strategis Perseroan berdasarkan reviu yang telah dilakukan oleh organ Komite di bawah Dewan Komisaris.

PROSES PEMANTAUAN DAN EVALUASI MANAJEMEN RISIKO

1. Pemantauan dan Evaluasi Risiko atas Pelaksanaan Perlakuan Risiko
   a. Pemantauan dan evaluasi Risiko terhadap Risiko Utama hasil integrasi Risiko.
   b. Pemantauan dan evaluasi Risiko dilakukan untuk mengevaluasi kualitas pelaksanaan Manajemen Risiko sesuai dengan perencanaan Manajemen Risiko yang telah disusun dalam dokumen perencanaan strategis dibandingkan dengan pencapaian kinerja atas target dari sasaran dan strategi yang telah ditetapkan.

the Risk value in accordance with the Residual Risk value target.

- Information on the Risk treatment plan at least includes: (i) Risk treatment options, (ii) Risk treatment plan activities, (iii) types of activity programs in the RKAP, (iv) Risk treatment activity output, (v) Risk treatment activity cost budget, (vi) responsible officials, and (vii) timeline for implementing Risk treatment activities.
- Risk treatment options are carried out effectively and efficiently in accordance with the results of the Risk Level calculation as the criteria for selecting Risk treatment options.
- Risk treatment preparation plan

d. Risk Prioritization

- Risk Integration Process

  SOEs carry out a Risk integration process for all Risks that have been assessed for Risk, both those originating from SOE subsidiaries or First Line units of the Parent SOE. The purpose of Risk integration is to obtain a list of Main Risks that will be included in the strategic planning draft, both RJP or RKAP, and will be monitored and evaluated at the enterprise level.
- Risk Aggregation Process

  Along with the submission of the Risk-based strategic planning proposal, either RJP or RKAP, the Company submits a working paper of the results of Risk strategy threshold calculation, the results of Risk assessment, and the results of Risk integration to the Ministry of SOEs.

4. Determination of Strategic Planning

   The Board of Directors submits the Company's strategic planning proposal, either RJP or RKAP that has been prepared based on Risk to the Board of Commissioners. The Risk-based strategic planning proposal has taken into account the Risk treatment costs and the Residual Risk Exposure target. The Board of Commissioners evaluates the Company's strategic planning proposal based on the review that has been conducted by the Committee organ under the Board of Commissioners.

RISK MANAGEMENT MONITORING AND EVALUATION PROCESS

1. 1. Risk Monitoring and Evaluation of Risk Treatment Implementation
   a. Risk monitoring and evaluation of the Main Risks resulting from Risk integration.
   b. Risk monitoring and evaluation are carried out to evaluate the quality of Risk Management implementation in accordance with the Risk Management planning that has been prepared in the strategic planning document compared to the achievement of performance on the targets of objectives and strategies that have been set.

c. Dewan Komisaris melalui Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi Risiko Terintegrasi paling sedikit setiap bulan.
d. Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris meliputi realisasi atas pencapaian kinerja, Risiko Utama yang masih mempengaruhi sasaran dan strategi perusahaan ke depan hingga akhir tahun, realisasi pelaksanaan Audit Intern, dan hasil Tata Kelola Terintegrasi.
e. Hasil pemantauan dan evaluasi Direksi dan reviu dari Dewan Komisaris menjadi bahan penyusunan laporan kepada Kementerian BUMN.

2. Pelaporan
Perseroan wajib menyampaikan laporan Manajemen Risiko kepada Kementerian BUMN, yang terdiri dari:
a. Laporan penerapan Manajemen Risiko
b. Laporan Audit Intern
c. Laporan Tata Kelola Terintegrasi
d. Laporan pencapaian kinerja
3. Evaluasi Kinerja
a. Berdasarkan pelaporan yang disampaikan oleh Perseroan, Kementerian BUMN akan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Risiko Agregasi dan Integrasi Risiko.
b. Pelaksanaan perlakuan Risiko Utama Kementerian BUMN yang merupakan Risiko Agregasi dari seluruh BUMN menjadi tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris.
c. Proses pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian BUMN tidak memindahkan atau melepaskan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris atas seluruh Risiko yang dihadapi oleh Perseroan dan akibat yang ditimbulkan dari Risiko tersebut.
d. Evaluasi terhadap pelaporan Manajemen Risiko Perseroan dilakukan secara menyeluruh sebagai bagian dari evaluasi kinerja Perseroan.

PROFIL RISIKO DAN PENGELOLAANNYA

Perusahaan telah mengidentifikasi beberapa risiko signifikan yang dimonitor secara periodik sampai dengan akhir tahun. Risiko-risiko Signifikan Perusahaan telah dipetakan ke dalam Taksonomi Risiko KBUMN pada level T5 (Peristiwa Risiko). Profil Risiko Signifikan Korporat Tahun 2025 yang dilengkapi dengan Inheren diuraikan pada tabel di bawah ini.

c. The Board of Commissioners through Integrated Governance Committee and Risk Monitoring Committee conducts an Integrated Risk evaluation at least every month.
d. Monitoring and evaluation carried out by the Board of Directors and the Board of Commissioners include the realization of performance achievements, Main Risks that still affect the company's targets and strategies going forward until the end of the year, realization of Internal Audit implementation, and Integrated Governance results.
e. The results of the Board of Directors' monitoring and evaluation and the review by the Board of Commissioners become the material for preparing a report to the Ministry of SOEs.

2. Reporting
The Company is required to submit a Risk Management report to the Ministry of SOEs, consisting of:
a. Risk Management implementation report
b. Internal Audit Report
c. Integrated Governance Report
d. Performance achievement report
3. Performance Evaluation
a. Based on the reporting submitted by the Company, the Ministry of SOEs will monitor and evaluate the Aggregation Risk and Risk Integration.
b. Implementation of the Main Risk treatment of the Ministry of SOEs which is the Aggregation Risk of all SOEs becomes the task and responsibility of the Board of Directors and the Board of Commissioners.
c. The monitoring and evaluation process carried out by the Ministry of SOEs does not transfer or release the responsibility of the Board of Directors and the Board of Commissioners for all Risks faced by the Company and the consequences arising from these Risks.
d. Evaluation of the Company's Risk Management reporting is carried out comprehensively as part of the Company's performance evaluation.

RISK PROFILE AND THE MITIGATION

The Company has identified several significant risks which are monitored periodically until the end of the year. The Company's Significant Risks have been mapped to the KBUMN Risk Taxonomy at level T5 (Risk Event). The 2025 Corporate Significant Risk Profile with Inherent is outlined in the table below.

No.	Peristiwa Risiko Risk Occasion	Penyebab Risiko Risk Causation	Mitigasi Risiko Risk Mitigation
1	Kegagalan penyiapan pengembangan bisnis baru (ekspansi Regional) Failure to prepare for new business development (Regional Expansion)	Kegagalan penyiapan pengembangan bisnis baru pada: 1. SPTP (*supporting* program IKN, Pemindagan *traffic* dari Sunda Kelapa, MNP, Dumai, Pelabuhan Kementrian/ Lembaga, TUKS) 2. SPJM (Pengelolaan Alur baru, Layanan Docking, Operasi Layanan MEPS di TUKS) 3. SPMT (Layanan Operasi TUKS, Layanan Operasi Pelabuhan Kementrian, Layanan STS Handling, Layanan Dedicaterd Terminal Gas, Pengembangan kijingKuala Tanjung) 4. SPSL (Integrasi Pelabuhan dengan Hinterland Melalui Multimoda, Pengembangan dan Optimalisaasi Kawasan Industri, Pengembangan BMTH, Kerjasama dengan Pelaku Industri Logistik). Failure to prepare for new business development in: 1. SPTP (Supporting the IKN program, Transferring trade traffic from Sunda Kelapa, MNP, Dumai, Ministry/Institutional Ports, TUKS) 2. SPJM (New Channel Management, Docking Services, MEPS Service Operations at TUKS) 3. SPMT (TUKS Operation Services, Ministry Port Operation Services, STS Handling Services, Dedicated Gas Terminal Services, Development of Kuala Tanjung Port) 4. SPSL (Port Integration with the Hinterland Through Multimodal, Development and Optimization of Industrial Estates, Development of BMTH, Cooperation with Logistics Industry Players)	• *Monitoring* dan *controling* terhadap pelaksanaan proyek di lingkungan Pelindo group • *Monitoring* Pelaksanaan Pengerukan Alur Pelayaran dan Kolam Pelabuhan • *Review* dan Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan • Monitoring and controlling project implementation within Pelindo group • Monitoring the Implementation of Shipping Channel and Port Basin Dredging • Review and Preparation of the Port Master Plan

No.	Peristiwa Risiko Risk Occasion	Penyebab Risiko Risk Causation	Mitigasi Risiko Risk Mitigation
2	Penurunan Trafik Kapal Decrease in Traffic	• Adanya kebijakan pemerintah terkait pembatasan ekspor batu bara yang berdampak pada penurunan trafik pada cabang yang melayani TUKS dengan kargo batu bara. • Tidak mendapatkan rekomendasi pelimpahan pemanduan dari Regulator. • Government policies regarding coal export restrictions have resulted in decreased traffic at branches serving TUKS with coal cargo. • No recommendation for pilotage transfer from the Regulator.	• Monitoring Implementasi Standardisasi Pelayanan Pemanduan: *Monitoring* implementasi *zero Waiting Time for Pilot, Monitoring* Pemenuhan petugas Pandu pada setiap wilayah, Monitoring Pola Karir Pandu, Monitoring Implementasi kelengkapan Petugas Pandu. • Standardisasi Operasi Pelayanan Kapal di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero): *Execution - Kick off meeting*, *Go live* implementasi Standardiasi Operasi Pelayanan Kapal Berbasis IP&C; Monitoring dan evaluasi penyiapan infrastruktur dan SDM • Peningkatan komunikasi dan kordinasi untuk eksistensi BUP PT Pelabuhan Indonesia (Persero) : Peningkatan komunikasi dan kordinasi Regulator • *Monitoring* dan Evaluasi Pengelolaan Alur Pelayaran di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero): Pemenuhan Perizinan Lingkungan, Rekomendasi Teknis Keselamatan Pelayaran, Skema Komersial Pengelolaan Alur Pelayaran • Evaluasi Pelimpahan Pemanduan dan Penundaan di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero): Pelaksanaan Evaluasi Pelimpahan 2 Tahunan Pelimpahan Pemanduan dan Penundaan Kapal , Monitoring Tindak Lanjut Temuan Evaluasi 2 Tahunan Pelimpahan Pemanduan dan Penundaan Kapal. • Monitoring the Implementation of Pilotage Service Standardization: Monitoring the implementation of Zero Waiting Time for Pilots, Monitoring the fulfillment of Pilotage officers in each region, Monitoring Pilotage Career Patterns, Monitoring the implementation of Pilotage Officer Completeness. • Standardization of Ship Service Operations within PT Pelabuhan Indonesia (Persero): Execution - Kick-off meeting, Go-live implementation of IP&C-Based Ship Service Operations Standardization; Monitoring and evaluation of infrastructure and human resource preparation • Improving communication and coordination for the existence of BUP of PT Pelabuhan Indonesia (Persero): Improved communication and coordination with regulators • Monitoring and Evaluation of Shipping Lane Management within PT Pelabuhan Indonesia (Persero): Environmental Permit Compliance, Technical Recommendations for Shipping Safety, Commercial Scheme for Shipping Lane Management • Evaluation of Pilotage and Towing Delegation within PT Pelabuhan Indonesia (Persero): Implementation of the biennial evaluation of transfer of pilotage and towing, and monitoring the follow-up findings of the biennial evaluation of transfer of pilotage and towing.

No.	**Peristiwa Risiko** Risk Occasion	**Penyebab Risiko** Risk Causation	**Mitigasi Risiko** Risk Mitigation
3	Penurunan Throughput Petikemas *Declining Container Throughput*	• Kalah bersaing dengan kompetitor PBM petikemas • Penurunan kegiatan transhipment di beberapa cabang pelabuhan. • Losing out in competition with container PBM competitors • Decreased transhipment activity at several port branches.	• Standarisasi Operasi Pelayanan Petikemas :Pelaksanaan persiapan standarisasi pada Cabang Pelabuhan Fak-fak, Toli-toli, Nunukan, dan Biak; • Digitalisasi Operasi Pelayanan Petikemas: persiapan digitalisasi pada Cabang Pelabuhan Fak-fak, Toli-toli, Nunukan, dan Biak • Integrasi Sistem Layanan Kapal dan Petikemas: pembahasan dengan SPTP, IPC TPK, dan ILCS terkait Update Progress dan Pembahasan Mekanisme Trial di Production Integrasi; UAT Integrasi Sistem Pelayanan Kapal (Phinnisi) dengan TOS Petikemas (TOSNUS) secara online dengan 14 Cabang/ Terminal • Kerjasama dengan Pelayaran Domestik untuk Layanan Operasional: Support kolaborasi pertukaran data informasi untuk mempermudah dan mempercepat proses perencanaan pelayanan operasi. • Standardization of Container Service Operations: Implementing standardization preparations at Fak-fak, Toli-toli, Nunukan, and Biak Port Branches; • Digitalization of Container Service Operations: Preparing for digitalization at Fak-fak, Toli-toli, Nunukan, and Biak Port Branches; • Integration of Ship and Container Service Systems: Discussions with SPTP, IPC TPK, and ILCS regarding Progress Updates and Trial Mechanism Discussions in Production Integration; UAT for the Integration of Ship Service System (Phinnisi) with the Container Service Operations System (TOSNUS) online at 14 Branches/ Terminals; • Cooperation with Domestic Shipping Lines for Operational Services: Supporting collaborative data exchange to simplify and accelerate the operational service planning process.

No.	Peristiwa Risiko Risk Occasion	Penyebab Risiko Risk Causation	Mitigasi Risiko Risk Mitigation
4	Penurunan Throughput Non-Petikemas Decline in Non-Container Throughput	• Kalah bersaing dengan kompetitor PBM non petikemas • Penurunan kegiatan ekspor/impor akibat penurunan kegiatan industri atau adanya kebijakan larangan ekspor/impor komoditas tertentu • Losing the Competition with Non-Container PBM Competitors • Decrease in export/import activity due to a decline in industrial activity or the implementation of export/import bans on certain commodities	• Standarisasi Operasi Terminal Non Petikemas – Multipurpose: Pemenuhan aspek standarisasi (execution) pada Pelabuhan Labuan Bajo, Maumere, Toli-Toli • Digitalisasi Operasi Terminal Non Petikemas – Multipurpose: Pemenuhan Perangkat IT, Resource Allocation, SIT, UAT, Training PTOS-M, Sosialisasi dan Go-live/Implementasi PTOS-M (*execution*) pada Pelabuhan Labuan Bajo, Maumere, Toli-Toli • Standarisasi Operasi Terminal Non Petikemas – Curah: Pemenuhan aspek standarisasi (*execution*) pada Pelabuhan Kupang, Biak, Tembilahan • Digitalisasi Operasi Terminal Non Petikemas – Curah: Pemenuhan Perangkat IT, Resource Allocation, SIT, UAT, Training PTOS-M, Sosialisasi dan Go-live / Implementasi PTOS-M (*execution*) pada Pelabuhan Kupang, Biak, Tembilahan • Terminalisasi Pelabuhan: *Mapping* cabang yang akan diajukan pengurusan peningkatan kemampuan pengoperasian fasilitas pelabuhan, FGD dengan Regional dan Sub Holding, Finalisasi daftar cabang usulan terminalisasi, Penyusunan Timeline ; Pemenuhan persyaratan dan pengajuan peningkatan pengoperasian terminal pada cabang terpilih, FGD dengan DJPL, pengurusan izin peningkatan kemampuan fasilitas Pelabuhan • Standardization of Non-Container Terminal Operations – Multipurpose: Fulfillment of standardization (execution) aspects at the Ports of Labuan Bajo, Maumere, and Toli-Toli • Digitalization of Non-Container Terminal Operations – Multipurpose: Fulfillment of IT Equipment, Resource Allocation, SIT, UAT, PTOS-M Training, Socialization and Go-live/Implementation of PTOS-M (execution) at the Ports of Labuan Bajo, Maumere, and Toli-Toli • Standardization of Non-Container Bulk Terminal Operations: Fulfillment of standardization aspects (execution) at the Ports of Kupang, Biak, and Tembilahan • Digitalization of Non-Container Bulk Terminal Operations: Fulfillment of IT Equipment, Resource Allocation, SIT, UAT, PTOS-M Training, Socialization and Go-live/Implementation of PTOS-M (execution) at the Ports of Kupang, Biak, and Tembilahan • Port Terminalization: Mapping of branches to be submitted for port facility operational capacity improvement, FGDs with Regional and Sub-Regional Holding, Finalization of the list of proposed terminalization branches, Preparation of the Timeline; Fulfillment of requirements and submission of improvements to terminal operations at selected branches, FGD with DJPL, processing of permits to increase the capacity of port facilities

No.	Peristiwa Risiko Risk Occasion	Penyebab Risiko Risk Causation	Mitigasi Risiko Risk Mitigation
5	Tidak Optimalnya Pengelolaan Aset Idle Suboptimal Management of Idle Assets	Utlisasi alat Bongkar Muat yang rendah & ketersediaan lahan idle/belum siap pakai Low utilization of loading and unloading equipment and the availability of idle/unready-to-use land	Optimalisasi Aset Lahan Tahun 2025 : Mapping Lahan Idle seluruh Regional, Evaluasi Proses Kerjasama, GCG dan Adminsitrasi Rencana Komersialisasi Lahan Idle • Evaluasi Relokasi Peralatan: • Penunjukan PIC lintas fungsi • Rapat koordinasi berkala dengan stakeholder • Penunjukan vendor berpengalaman • Pengawasan ketat saat dismantling dan mobilisasi • Asuransi pengangkutan • Identifikasi dokumen sejak awal • Koordinasi aktif dengan otoritas terkait • Pengawalan administratif oleh tim legal • Sosialisasi dan pengawasan K3 ketat • Penggunaan APD dan SOP standar tinggi • Audit K3 harian selama pekerjaan Land Asset Optimization in 2025: Mapping Idle Land throughout the Region, Evaluation of the Cooperation Process, GCG, and Administration of Idle Land Commercialization Plans Equipment Relocation Evaluation: • Appointment of cross-functional PICs • Regular coordination meetings with stakeholders • Appointment of experienced vendors • Strict supervision during dismantling and mobilization • Transportation insurance • Early document identification • Active coordination with relevant authorities • Administrative oversight by the legal team • Strict socialization and supervision of OHS • Use of high-standard PPE and SOPs • Daily OHS audits during work
6	Rugi selisih kurs Foreign Exchange Losses	Fluktuasi nilai tukar Rp terhadap USD Fluctuations in the Rupiah exchange rate against the USD	Optimalisasi kas dan pendanaan Pelindo Group Pelindo Group Cash and Funding Optimization
7	Inefisiensi Biaya Cost Inefficiencies	Pemborosan sumber daya atau proses yang tidak efektif Waste of resources or ineffective processes	Program Efisiensi Biaya dengan tema efisiensi : • Optimasi Beban Bahan Bakar • Optimasi Kontrak Kerjasama Operasi, Sewa dan Penunjang Operasi • Pengadaan Bersama • Efisiensi Beban Pemeliharaan • Optimasi Pemanfaatan Teknologi dan Informasi • Efisiensi Beban langganan Listrik, Air dan Telepon • Optimasi Beban SDM • Efisiensi Beban Administrasi dan Umum Cost Efficiency Program with the following efficiency themes: • Fuel Cost Optimization • Operational Cooperation, Lease, and Operational Support Contract Optimization • Joint Procurement • Maintenance Cost Efficiency • Technology and Information Utilization Optimization • Electricity, Water, and Telephone Subscription Cost Efficiency • Human Resource Cost Optimization • Administration and General Cost Efficiency

No.	Peristiwa Risiko Risk Occasion	Penyebab Risiko Risk Causation	Mitigasi Risiko Risk Mitigation
8	Keterlambatan pelaksanaan investasi strategis (di atas Rp 200 M) *Delays in the implementation of strategic investments (above Rp200 billion)*	Ketidaksesuaian pelaksanaan proyek antara rencana dan realisasi di lapangan *Mismatches between project implementation plan and actual implementation on the site*	• Perubahan persetujuan lingkungan di Terminal Kijing : Penyusunan dokumen perubahan ANDAL RKL-RPL, Sidang dan Perbaikan ANDAL RKL RPL • Perencanaan Desain Infrastruktur Dasar Reserved Area dan Inner Port Road: Pelaksanaan Jasa Konsultansi Detail Engineering Design (DED) • Monitoring Pelaksanaan Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) • Monitoring Tingkat Pemenuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan di Bidang Lingkungan Hidup : Konfirmasi Tindak Lanjut Gap Kriteria PROPER Biru ; Monitoring Pemenuhan Kriteria PROPER Biru, Report Pemenuhan Kriteria PROPER Biru oleh Cabang • Pengembangan dashboard Monitoring Pelaksanaan proyek Investasi (Tahap III) : Sosialisasi dan Pengembangan Dashboard • Integrasi Lanjutan Sistem Aplikasi Pelindo Usulan Investasi (PELUIT) dengan Dashboard Monitoring Investasi : Pengembangan dan UAT, Monitoring dan Evaluasi serta penyusunan Project Closing • Monitoring Realisasi Investasi • Evaluasi Paska Investasi: Pengumpulan data realisasi kinerja operasi dan keuangan pasca investasi, Analisa komparasi kajian awal dibandingkan dengan realisasi, Rekonsiliasi data realisasi dengan semua entitas terkait • *Changes to the environmental approval at Kijing Terminal: Preparation of revised ANDAL RKL-RPL documents, and ANDAL RKL-RPL hearing and revision.* • *Basic Infrastructure Design Planning for the Reserved Area and Inner Port Road: Implementation of Detailed Engineering Design (DED) Consulting Services.* • *Monitoring the Implementation of Environmental Management and Monitoring Plan (RKL-RPL).* • *Monitoring the Level of Compliance with Environmental Laws and Regulations: Confirmation of Follow-up Actions on Gap in Blue PROPER Criteria. Monitoring of PROPER Blue Criteria Fulfillment, Reporting of PROPER Blue Criteria Fulfillment by Branch* • *Development of Investment Project Implementation Monitoring Dashboard (Phase III): Socialization and Dashboard Development* • *Advanced Integration of Pelindo Investment Proposal Application System (PELUIT) with Investment Monitoring Dashboard: Development and UAT, Monitoring and Evaluation, and Preparation of Project Closing* • *Monitoring of Investment Realization* • *Post-Investment Evaluation: Collection of operational and financial performance realization data post-investment, Comparative analysis of initial studies compared to realization, Reconciliation of realization data with all related entities*

No.	Peristiwa Risiko Risk Occasion	Penyebab Risiko Risk Causation	Mitigasi Risiko Risk Mitigation
9	Denda Pajak (atas SPT Masa Withholding dan PPN bulanan) Tax Penalties (on Monthly Withholding and VAT Tax Returns)	Ketersediaan SDM untuk collect data pelaporan Pajak dan keterbatasan data pelaporan Availability of human resources to collect tax reporting data and limitations of reporting data	• Sosialisasi Perpajakan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) • Pengajuan SKB (Surat Keterangan Bebas) PPh Pasal 23 • Pengajuan SKF (Surat Keterangan Fiskal) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) • Pengembangan Sistem Informasi Perpajakan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) - (Lanjutan) • Pengajuan SKTD (Surat Keterangan Tidak Dipungut) PPN PT Pelabuhan Indonesia (Persero) • Taxation Socialization at PT Pelabuhan Indonesia (Persero) • Submission of Income Tax Article 23 Exemption Certificate (SKB) • Submission of Fiscal Statement (SKF) at PT Pelabuhan Indonesia (Persero) • Development of Tax Information System at PT Pelabuhan Indonesia (Persero) - (Continued) • Submission of VAT Exemption Certificate (SKTD) at PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
10	Terlambatnya Implementasi Inisiatif Strategis berkaitan dengan pemurnian bisnis anak perusahaan Delayed Implementation of Strategic Initiatives related to the business refinement of subsidiaries	Banyaknya stakeholder yang terlibat dalam proses permurnian bisnis serta memerlukan pembahasan yang alot. Numerous stakeholders involved in the business refinement process require rigorous discussions.	Akselerasi Implementasi Pemurnian Bisnis : • Monitoring proses GCG di entitas terkait, Proses pengumpulan dokumen pendukung persyaratan RUPS, Proses persetujuan RUPS, Pelaksanaan transaksi aksi korporasi • Akselerasi Kajian/Roadmap Pemurnian Bisnis • Pelaksanaan Business Performance *Review* Triwulanan • Forum Anak Perusahaan Accelerating Business Purification Implementation: • Monitoring GCG processes in related entities, Collecting supporting documents for GMS requirements, GMS approval process, Implementing corporate action transactions • Accelerating Business Purification Studies/Roadmaps • Implementing Quarterly Business Performance Reviews • Subsidiary Forum

No.	Peristiwa Risiko Risk Occasion	Penyebab Risiko Risk Causation	Mitigasi Risiko Risk Mitigation
11	*Enviroment Social Government*	• Adanya emisi karbon yang dihasilkan dari aktivitas di pelabuhan • Masyarakat merasa adanya dampak yang dipandang buruk terhadap aset/fasilitas/ aktivitas-nya yang telah ada di sekitar lokasi pelabuhan. • Adanya harapan dari masyarakat atas peningkatan taraf hidup atau ekonomi sebagai bagian dari komunitas yang ada di sekitar pelabuhan. • Proses bongkar muat curah yang tidak sesuai standar,Minimnya pengawasan dan monitoring pengelolaan lingkungan, Minimnya fasilitas penyimpanan limbah B3. • *Carbon emissions resulting from port activities* • *The community perceives negative impact on existing assets, facilities, and activities around the port.* • *There are hopes for improved living standards and economic opportunities as part of the community surrounding the port.* • *Bulk loading and unloading processes that do not meet standards, minimal environmental management supervision and monitoring, and inadequate B3 waste storage facilities.*	• Implementasi dan integrasi fungsi corporate sustainability berbasis Aspek Environment, Social, and Governance (ESG) di Anak Perusahaan: internalisasi, integrasi, Monitoring Pengembangan dan Integrasi • Implementasi ESG dengan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Praktik Pengungkapan Kinerja Keberlanjutan: Pelaksanaan Development • *Monitoring* Tingkat Pemenuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan di Bidang Lingkungan Hidup : Konfirmasi Tindak Lanjut Gap Kriteria PROPER Biru, Monitoring Pemenuhan Kriteria PROPER Biru • Monitoring Pengurusan Persetujuan Lingkungan dan DELH/DPLH • Implementasi Energi Ramah Lingkungan: Pendampingan Pelaksanaan Elektrifikasi QCC di Terminal Petikemas Ambon, RTG di Terminal Petikemas Makassar, QCC di Terminal Petikemas Semarang, RTG di Terminal Petikemas Surabaya, dan Modifikasi RTG menjadi Hybrid di PT BJTI, • Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik • Implementasi Program/Bantuan TJSL pada Proyek Strategis Perusahaan : a. Pelaksanaan Program/Bantuan TJSL di wilayah Ring 1 Pelabuhan b. Perencanaan Program TJSL Pada Proyek Strategis (NPEA) • Implementation and integration of corporate sustainability functions based on Environmental, Social, and Governance (ESG) aspects in subsidiaries: internalization, integration, monitoring, development, and integration • ESG implementation through the development of a reporting system and disclosure practices for sustainability performance: Development implementation • Monitoring the level of compliance with environmental regulations: Confirmation of follow-up on gaps in PROPER Blue criteria, monitoring compliance with the PROPER Blue criteria • Monitoring of environmental approvals and DELH/ DPLH • Environmentally friendly energy implementation: Assistance with the implementation of QCC electrification at Ambon Container Terminal, RTG at Makassar Container Terminal, QCC at Semarang Container Terminal, RTG at Surabaya Container Terminal, and the modification of RTG to a hybrid at PT BJTI • Public Information Disclosure Management • Implementation of CSR Program/Assistance for the Company's Strategic Projects: a. Implementation of CSR Programs/Assistance in the Port's Ring 1 Area b. CSR Program Planning for Strategic Projects (NPEA)

No.	Peristiwa Risiko Risk Occasion	Penyebab Risiko Risk Causation	Mitigasi Risiko Risk Mitigation
12	Cyber Attack Sistem Informasi Information System Cyber Attacks	Adanya ancaman tindakan berbahaya seperti Virus, malware, dll. The threat of malicious actions such as viruses, malware, etc.	• Peningkatan Cyber Security di LIngkungan PT Pelabuhan Indonesia : a. Standarisasi TOS b. Monitoring bulanan insiden kemanan informasi juni c. Tindaklanjut temua terkait keamanan informasi • Implementasi Integrasi Sistem Operasi Pelayanan Kapal dan Petikemas : Development Stage, Sosialisasi, UAT, Training dan Go-Live Integrasi TOS Petikemas (PTOS-PK dan TONUS) dengan Phinnisi (Aplikasi Pelayanan Kapal); Pembuatan Konsep Integrasi Sistem TOS Petikemas (PTOS-PK dan TONUS) antar Terminal dan Penetapan Rencana Piloting Cabang Integrasi TOS Petikemas (PTOS-PK dan TONUS) antar Terminal • Integrasi Sistem Operasi Terminal Non Petikemas : Integrasi PTOS-M dan Phinnisi (Execution - Development Stage; Sosialisasi, UAT, Training dan Go-Live Integrasi PTOS-M dengan Phinnisi) , Integrasi PTOS-M antar Terminal (Konsep) (Execution - Pembuatan Konsep Deliverable Integrasi Sistem PTOS-M antar Terminal dan Stakeholder; Penetapan Rencana Piloting Cabang Integrasi PTOS-M antar Terminal) • Improving Cyber Security within PT Pelabuhan Indonesia (Persero) : a. TOS Standardization b. Monthly monitoring of June information security incidents c. Follow-up on information security findings • Implementation of Integrated Ship and Container Service Operating Systems: Development Stage, Socialization, UAT, Training, and Go-Live Integration of Container TOS (PTOS-PK and TONUS) with Phinnisi (Ship Service Application); Concept Development for Container TOS System Integration (PTOS-PK and TONUS) between Terminals and Determination of Branch Piloting Plans for Container TOS Integration (PTOS-PK and TONUS) between Terminals • Non-Container Terminal Operating System Integration: PTOS-M and Phinnisi Integration (Execution - Development Stage; Socialization, UAT, Training, and Go-Live for PTOS-M and Phinnisi Integration), PTOS-M Integration between Terminals (Concept) (Execution - Concept Development for Deliverable Integration of PTOS-M Systems between Terminals and Stakeholders; Determination of Branch Piloting Plans for PTOS-M Integration between Terminals)

No.	Peristiwa Risiko Risk Occasion	Penyebab Risiko Risk Causation	Mitigasi Risiko Risk Mitigation
13	Kecelakaan Kerja pada Pekerja Perusahaan Workplace Accidents Involving Company Employees	Kurangnya kepedulian dan kesadaran terhadap implementasi Budaya K3 Lack of concern and awareness regarding the implementation of OHS Culture	• Peningkatan dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana K3 • Penyusunan gap analysis kebutuhan Sarana dan Prasarana K3 minimal (*must have*) berdasarkan kondisi eksisting masing-masing unit kerja • Penyusunan detail sarpras K3 minimal (*must have*) • Pelaksanaan peningkatan dan pemenuhan sarpras K3 sesuai dengan perencanaan • Monitoring dan Evaluasi proses peningkatan dan pemenuhan sarpras K3 • Peningkatan awareness K3 melalui proses internalisasi budaya, peningkatan kapabilitas SDM dan platform digital K3: • Pemetaan Maturitas Implementasi Sistem Manajemen • K3Penyelarasan tata kelola kebijakan dan proses K3 • Identifikasi kebutuhan kompetensi berupa pelatihan dan sertifikasi untuk pengelola K3 dan *business owner* • Pelaksanaan Pengembangan *Platform* Aplikasi MyHSSE fase 2 • Implementasi Sistem Manajemen K3 : • Penerapan norma K3 berdasarkan peraturan • Pelaksanaan Rapat P2K3 • Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen • Pelaksanaan Audit Internal ISO 45001:2018 • Pelaksanaan Audit Eksternal ISO 45001:2018 • Improvement and Provision of OHS Facilities and Infrastructure • Compiling a gap analysis of the minimum OHS facilities and infrastructure (must-haves) based on existing conditions of each work unit • Developing detailed OHS infrastructure (must-haves) • Implementing the improvement and fulfillment of OHS infrastructure in accordance with the plan • Monitoring and Evaluation of OHS infrastructure improvement and fulfillment process • Increasing OHS awareness through cultural internalization, human resource capability enhancement, and OHS digital platforms: • Mapping the Maturity of Management System Implementation • Alignment of OHS policy and process governance • Identification of competency needs in the form of training and certification for OHS managers and business owners • Implementing MyHSSE Application Platform Development phase 2 • OHS Management System Implementation: • Implementation of OHS norms based on regulations • Implementing P2K3 Meetings • Implementing Management Review Meetings • Implementation of ISO 45001:2018 Internal Audits • Implementation of ISO 45001:2018 External Audits
14	Ketidaksesuaian kualifikasi Pekerja Worker's Unqualified Qualifications	Level kompetensi pekerja pada jabatan yang sama tidak seragam The competency level of workers in the same position is not uniform.	Leadership Development Program : Pelaksanaan Apprenticeship & Laporan ALPI: Cycle 2 *Leadership Development Program: Apprenticeship Implementation & ALPI Report: Cycle 2*

No.	Peristiwa Risiko Risk Occasion	Penyebab Risiko Risk Causation	Mitigasi Risiko Risk Mitigation
15	Pelanggaran Kode Etik (Fraud/Penyuapan/ Gratifikasi/lainnya) Violation of the Code of Ethics (Fraud/ Bribery/Gratuities/ Other)	ketidaktahuan peraturan, atau pengawasan yang lemah Ignorance of regulations or weak supervision	• Penerapan dan Pengelolaan Sistem Manajemen Terpadu di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) • Implementasi Program Kerja Stranas PK (Strategi Nasional Pencegahan Korupsi) : Monitoring Pelaksanaan Implementasi STID, SIMON TKBM dan Progress TBS di Lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) • Pengelolaan Gratifikasi dan Whistblowing PT Pelabuhan Indonesia (Persero) : Sosialisasi WBS dan Gratifikasi, Koordinasi Komite Pelindo Bersih TW 2, Pelaksanaan pengelolaan *monitoring* dan evaluasi gratifikasi, Pelaksanaan peningkatan pemahaman gratifikasi, Pembuatan laporan Semester 1 • Pelaksanaan Roadmap Implementasi ICOFR : 1. Laporan Hasil pelatihan ICOFR , Laporan Progress deployment aplikasi ICOFR, Laporan progress penyusunan BPM RCM, Laporan enhancement PICO • Implementation and Management of Integrated Management System at PT Pelabuhan Indonesia (Persero) • Implementation of National Strategy for Corruption Prevention (Stranas PK) Work Program: Monitoring the Implementation of STID, SIMON TKBM, and TBS Progress at PT Pelabuhan Indonesia (Persero) • Gratification and Whistleblowing Management at PT Pelabuhan Indonesia (Persero): Socialization of WBS and Gratification, Coordination of Pelindo Bersih Committee for Quarter 2, Implementation of Gratification Monitoring and Evaluation Management, Implementation of Gratification Understanding Improvement Program, Preparation of Semester 1 Report • Implementation of ICOFR Implementation Roadmap: 1. ICOFR Training Results Report, ICOFR Application Deployment Progress Report, BPM RCM Development Progress Report, PICO Enhancement Report
16	Gangguan layanan Service disruptions	• Belum terstandarnya pola operasional sehingga berdampak pada kinerja yang rendah • Ketidaksiapan fasilitas ketika akan digunakan oleh pelanggan (misal terbatasnya jumlah kapal tunda, kekurangan alat, kekurangan lapangan penumpukan) • Lack of standardized operational patterns, resulting in poor performance. • Facilities unprepared for customer use (e.g., limited number of tugboats, lack of equipment, lack of storage yards).	• Monitoring Availability dan Pemeliharaan Fasilitas Sipil Pelabuhan • Implementasi BCM di Pelindo Group: a. Menyurati Regional untuk Implementasi BCM, mulai dari penyusuna BIA, BCP dan pelaksanaan Drill b. Melakukan rapat koordinasi dengan Regional 2, IPC TPK, JICT, NPCT1, TPK KOJA terkait pelaksanaan Drill table top) tentang penanganan kemacetan di area Pelabuhan Tanjung Priok c. Menyurati Subholding untuk Implementasi BCM, mulai dari penyusunan BIA, BCP dan pelaksanaan Drill d. Melakukan sosialisasi kepada pemilik proses bisnis kritikal Kantor Pusat • *Monitoring Availability and Maintenance of Port Civil Facilities* • *BCM Implementation in Pelindo Group:* a. *Writing to Regional Offices regarding BCM Implementation, starting with the preparation of BIA, BCP, and Drilling* b. *Conducting coordination meetings with Regional Office 2, IPC TPK, JICT, NPCT1, and TPK KOJA regarding the implementation of Drilling (tabletop) on congestion management in Tanjung Priok Port area* c. *Writing to Subholding Offices regarding BCM Implementation, starting with the preparation of BIA, BCP, and Drilling* d. *onducting outreach to critical business process owners at Head Office*

No.	Peristiwa Risiko Risk Occasion	Penyebab Risiko Risk Causation	Mitigasi Risiko Risk Mitigation
17	Tidak tercapainya target Trafik JTCC Failure to achieve JTCC traffic targets .	• Belum terintegrasinya JTCC dengan Jalan Tol Umum lainnya. • Adanya ketidakpastian rencana pengembangan wilayah koridor JTCC dari pemerintah Daerah setempat • Keluhan pelaku usaha logistik terhadap tarif terlalu mahal • JTCC has not been integrated with other public toll roads. • Uncertainty regarding the local government's development plans for JTCC corridor. • Complaints from logistics businesses about excessive tariffs	• Integrasi JTCC dengan JORR-1 dan/atau Divestasi Saham PT CTP • RKM SPSL - Pendampingan Integrasi JTCC dengan Jaringan Tol Jabodetabek =: Monitoring Tahap Pelaksanaan Integrasi Tarif JTCC dengan Jaringan Tol Jabodetabek • RKM SPSL - Integrasi JTCC dengan Jaringan Tol Jabodetabek: Penyusunan Berita Acara Kesepakatan antara BUJT, Penyusunan Berita Acara Persetujuan Integrasi , Tahap Pelaksanaan Integrasi Tarif JTCC dengan Jaringan Tol Jabodetabek • RKM SPSL - Pengembangan Rest Area dan Logistic Hub di JTCC : Kerjasama dengan mitra strategis • Integration of JTCC with JORR-1 and/or Divestment of PT CTP Shares • SPSL RKM - Mentoring for JTCC Integration with the Jabodetabek Toll Road Network =: Monitoring the Implementation Stage of JTCC Tariff Integration with Jabodetabek Toll Road Network • SPSL RKM - JTCC Integration with Jabodetabek Toll Road Network: Preparation of Minutes of Agreement between BUJT, Preparation of Minutes of Integration Approval, Implementation Stage of JTCC Tariff Integration with Jabodetabek Toll Road Network • SPSL RKM - Development of Rest Areas and Logistics Hubs at JTCC: Collaboration with Strategic Partners

PENILAIAN RISIKO

Pemetaan Risiko dengan menggunakan heat map 5x5 yang berisi informasi peta warna risiko yang memuat realisasi Risiko Residual Triwulan 4 dibandingkan dengan Risiko Inheren dan Target Risiko Residual Triwulan 4. Peta risiko perusahaan ditunjukan sebagai berikut.

RISK ASSESSMENT

Risk Mapping using a 5x5 heat map containing risk color map information which contains the realization of Fourth Quarter Residual Risk compared to Fourth Quarter Residual Risk target. The Company's risk map is shown below.

Risiko Inheren Awal Tahun 2025
Inherent Risk Early 2025

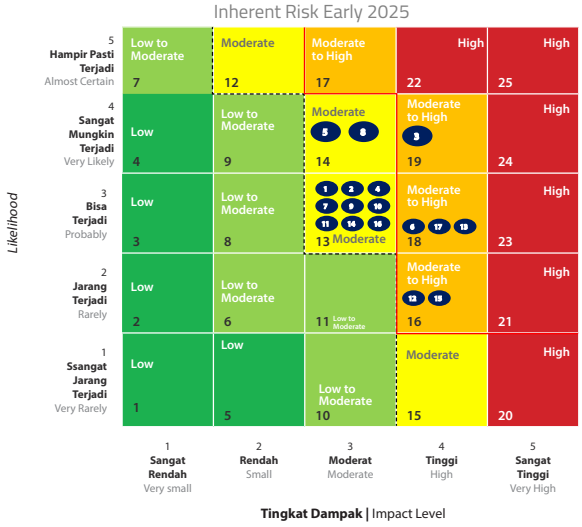

Realisasi Risiko Residual TW 4 2025
Realization of Residual Risk Q4 2025

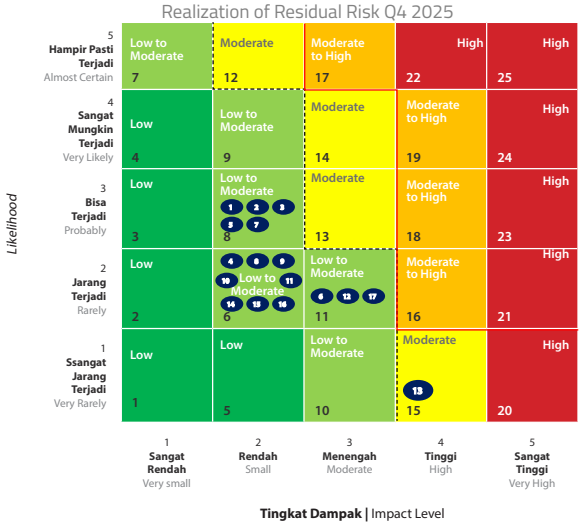

Realisasi Risiko Residual Des 2025 (unaudited)
Residual Risk Realization Dec 2025 (unaudited)

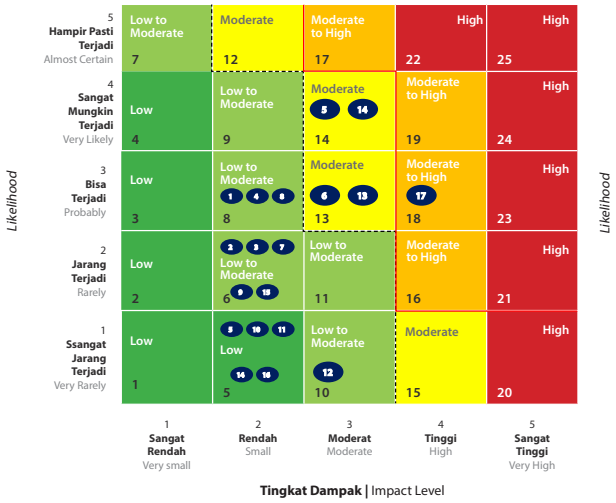

1	Kegagalan penyiapan pengembangan bisnis baru (ekspansi Regional) Failure to prepare for new business development (regional expansion)	10	Terlambatnya Implementasi Inisiatif Strategis berkaitan dengan pemurnian bisnis anak perusahaan Delays in the Implementation of Strategic Initiatives related to the refinement of subsidiary businesses
2	Penurunan Trafik Kapal Decrease in Traffic	11	Enviromental Social Governance
3	Penurunan Throughput Petikemas Decrease in Container Throughput	12	Cyber Attack Sistem Informasi Information System Cyberattacks
4	Penurunan Throughput Non-Petikemas Decrease in Non-Container Throughput	13	Kecelakaan Kerja pada Pekerja Perusahaan Workplace Accidents involving Company Employees
5	Tidak Optimalnya Pengelolaan Aset Idle Suboptimal Management of Idle Assets	14	Ketidaksesuaian kualifikasi Pekerja Worker's Qualification Mismatch
6	Rugi selisih kurs Foreign Exchange Losses	15	Pelanggaran Kode Etik (Fraud/Penyuapan/Gratifikasi/ lainnya) Code of Ethics Violations (Fraud/Bribery/Gratuities/Other)
7	Inefisiensi Biaya Cost Inefficiencies	16	Gangguan layanan Service Disruptions
8	Keterlambatan pelaksanaan investasi strategis (di atas Rp 200 M) Delays in Implementing Strategic Investments (above Rp200 Billion)	17	Tidak tercapainya target Trafik JTCC Failure to Achieve JTCC Traffic Targets
9	Denda Pajak (atas SPT Masa Withholding dan PPN bulanan) Tax Penalties (on Monthly Withholding and VAT Returns)		

Pada Peta Risiko di atas dapat terlihat bahwa realisasi Risiko Residual Triwulan 4 banyak mengalami perubahan, baik penurunan skala risiko maupun kenaikan skala risiko. Terdapat 11 (Sebelas) Sub-Kelompok Risiko (T4) yang berada diatas target risiko, terdapat 2 (Sembilan) Sub-Kelompok Risiko (T4) sesuai dengan target risiko dan terdapat 4 (Empat) Sub-Kelompok Risiko (T4) yang tidak tercapai target risiko nya. Hal ini dikarenakan realisasi progress capaian KRI (*key risk indicator*) triwulan berjalan pada masing-masing peristiwa risiko berpengaruh signifikan pada perubahan skala probabilitas.

EVALUASI PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO

Perseroan melakukan asesmen Indeks Kematangan Risiko (*Risk Maturity Index*) dengan menggunakan 2 (dua) penilaian aspek dimensi, yakni:

1. Aspek Dimensi seperti Budaya dan Kapabilitas Risiko, Organisasi dan Tata Kelola, Kerangka Risiko dan Kepatuhan, Dimensi Proses dan Kontrol Risiko, dan Model, Data, dan Teknologi Risiko;
2. Aspek Kinerja meliputi Tingkat Kesehatan Peringkat Akhir (*Final Rating*) dan Peringkat Komposit Risiko.

Tingkat maturitas manajemen risiko yang dilakukan pada Pelindo tahun buku 2024 dan dievaluasi pada tahun 2025 dengan memperoleh nilai 3,15 dalam kategori **Fase Praktik yang Baik** menggambarkan pencapaian yang signifikan dalam pengelolaan risiko perusahaan. Penilaian ini menunjukkan pelaksanaan sistem manajemen risiko yang diterapkan Perseroan sudah sesuai dengan standar yang diharapkan dalam pengelolaan risiko.

PERNYATAAN DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS ATAU KOMITE AUDIT ATAS KECUKUPAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Dewan Komisaris Perusahaan memiliki organ pendukung yakni Komite *Good Corporate Governance* dan Pemantau Manajemen Risiko yang bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas satuan kerja Manajemen Risiko guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris dan Direksi berpandangan bahwa sistem manajemen risiko tahun 2025 telah berjalan memadai. Hal ini berdasarkan bawah Group Manajemen Risiko Kantor Pusat secara periodik selalu melakukan pertemuan dengan Komite GCG dan PMR dalam rangka melakukan koordinasi terkait rencana dan *monitoring* proses implementasi Manajemen Risiko Perusahaan. Hasil koordinasi dituangkan dalam bentuk notulen rapat untuk selanjutnya dapat ditindaklanjuti oleh Group Manajemen Risiko. Koordinasi yang secara rutin setiap bulan telah dilakukan dengan Komite GCG dan PMR di tahun 2025. Adapun topik yang dibahas dalam koordinasi tersebut diantaranya meliputi Usulan Profil Risiko RKAP, Hasil *Monitoring* Profil Risiko Bulanan, dan hal-hal lainnya yang menjadi perhatian Direksi dan Komisaris.

From the Risk Map above, it can be observed that the realization of Residual Risks in the fourth quarter experienced various changes, both decreases and increases in risk scale. There were 11 (eleven) Risk Sub-Groups (Q4) above the risk target, 2 (two) Risk Sub-Groups (Q4) in line with the risk target, and 4 (four) Risk Sub-Groups (Q4) that did not achieve their risk targets. This was due to the realization progress of Key Risk Indicators (KRI) during the quarter for each risk event, which significantly influenced changes in probability levels.

EVALUATION OF RISK MANAGEMENT IMPLEMENTATION

The Company conducted a Risk Maturity Index (RMI) assessment using two evaluation dimensions, namely:

1. Dimensional Aspects, including Risk Culture and Capability, Organization and Governance, Risk Framework and Compliance, Risk Process and Control, and Risk Model, Data, and Technology;
2. Performance Aspects, including Final Rating Health Level and Composite Risk Rating.

The level of risk management maturity at Pelindo for the 2024 fiscal year, evaluated in 2025, achieved a score of 3.15, categorized under the “Good Practice Phase,” reflecting significant progress in the Company’s risk management. This assessment indicates that the Company’s risk management system has been implemented in accordance with the expected standards.

STATEMENT OF BOARD OF DIRECTORS AND/ OR BOARD OF COMMISSIONERS OR AUDIT COMMITTEE ON THE ADEQUACY OF RISK MANAGEMENT SYSTEM

The Company’s Board of Commissioners is supported by the Good Corporate Governance Committee and the Risk Management Monitoring Committee, which are responsible for monitoring and evaluating the implementation of risk management functions and providing recommendations to the Board of Commissioners. Board of Commissioners and Board of Directors are of the view that the risk management system in 2025 has been adequately implemented. This assessment is based on the fact that the Risk Management Group at the Head Office regularly conducts meetings with the GCG and Risk Monitoring Committees to coordinate planning and monitor the implementation of the Company’s risk management processes. The outcomes of these meetings are documented in meeting minutes for follow-up actions by the Risk Management Group. Such coordination has been conducted routinely on a monthly basis throughout 2025. Topics discussed in these meetings include the proposed RKAP Risk Profile, the results of monthly risk profile monitoring, and other matters of concern to the Board of Directors and Board of Commissioners.

PERKARA HUKUM LEGAL CASES

PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Tabel Perkara Hukum
Legal Cases

No.	Perkara Penting Litigation	Jumlah Amount		
		Perdata Civil	Pidana Criminal	Hubungan Industrial Industrial Relations
1.	Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) Completed (legally binding and final)	18	3	-
2.	Dalam proses penyelesaian Under settlement process	-	-	-
Total		**18**	**3**	**-**

PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

LEGAL CASES FACED BY THE COMPANY

Tabel Perkara Hukum yang Dihadapi Perusahaan
Legal Cases Faced by the Company

No	Register, Locus Perkara dan Para Pihak Register, Case Locus and Parties	Pokok Perkara / Gugatan Subject Matter/Lawsuit
1	No. 80/Pdt.G/2021/PN Kis, tanggal 29 Sept 2021 Locus di Pelabuhan Kuala Tanjung, Kabupaten Asahan (Sumatera Utara) PARA PIHAK 1. Penggugat : Jonner Samosir 2. Tergugat I : PT Pelindo 3. Tergugat II : PMO Pengadaan Tanah PT Pelindo 4. Tergugat III : KJPP Dedi, Arifin, Nazir & Rekan 5. Tergugat II : BPN Asahan No. 80/Pdt.G/2021/PN Kis, dated September 29, 2021 Location: Kuala Tanjung Port, Asahan Regency (North Sumatra) PARTIES 1. Plaintiff: Jonner Samosir 2. Defendant I: PT Pelindo 3. Defendant II: Land Procurement Manager of PT Pelindo 4. Defendant III: KJPP Dedi, Arifin, Nazir & Rekan 5. Defendant II: Asahan Land Agency	• Dalam rangka Pembangunan dan pengembangan Terminal Multipurpose Pelabuhan Kuala Tanjung, telah diadakan pengadaan tanah dengan skema kepentingan umum seluas 130,4 M2 dan melalui Pengadilan Negeri Kisaran telah ditetapkan Konsinyasi berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kisaran No. 28/Pdt.P. Kons/2021/PN.Kis tanggal 7 September 2021 • Atas penetapan ganti rugi tersebut penggugat keberatan dan mengajukan gugatan PMH ke PN Kisaran dengan petitum yang intinya sebagai berikut : a. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Penetapan Pengadilan Negeri Kisaran No. 28/Pdt.P. Kons/2021/PN.Kis b. Menetapkan nilai Penggantian pembebasan tanah seluas 130,4 M2 berikut bangunan milik Penggugat tersebut sebesar Rp. 627.280.000,- c. Dll • For the construction and expansion of Kuala Tanjung Port Multipurpose Terminal, land acquisition for the public interest was conducted, covering an area of 130.4 m2. Kisaran District Court determined the consignment based on Kisaran District Court Decision No. 28/Pdt.P. Kons/2021/PN.Kis dated September 7, 2021. • The plaintiff objected to the compensation determination and filed a PMH lawsuit with Kisaran District Court with the following petition: a. Declaring Kisaran District Court Decision No. 28/Pdt.P. Kons/2021/PN.Kis null and void. b. Determining the compensation value for the acquisition of 130.4 m2 land and the building belonging to the plaintiff at Rp627,280,000. c. Etc.
2	No.82/PDT.G/2021/PN.KIS, tanggal 29 Sep 2021 Locus di Pelabuhan Kuala Tanjung, Kabupaten Asahan (Sumatera Utara) PARA PIHAK 1. Penggugat : Ramadhan Abadi 2. Tergugat I : PT Pelindo 1 3. Tergugat II : BPN Asahan 4. Tergugat III : KJPP No. 82/PDT.G/2021/PN.KIS, dated September 29, 2021 Location: Kuala Tanjung Port, Asahan Regency (North Sumatra) PARTIES 1. Plaintiff: Ramadhan Abadi 2. Defendant I: PT Pelindo 1 3. Defendant II: Asahan Land Agency 4. Defendant III: KJPP	• Dalam rangka Pembangunan dan pengembangan Terminal Multipurpose Pelabuhan Kuala Tanjung, telah diadakan pengadaan tanah dengan skema kepentingan umum seluas 3.279,97 M2 dan melalui pengadilan Negeri Kisaran telah ditetapkan Konsinyasi berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kisaran No. 23/Pdt.P. Kons/2021/PN.Kis tanggal 7 September 2021 • Atas penetapan ganti rugi tersebut penggugat keberatan dan mengajukan gugatan PMH ke PN Kisaran dengan petitum yang intinya sebagai berikut : a. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Penetapan Pengadilan Negeri Kisaran No. 23/Pdt.P. Kons/2021/PN.Kis b. Menetapkan nilai Penggantian pembebasan tanah seluas 3.279,97 M2 berikut bangunan milik Penggugat tersebut sebesar Rp. 10.533.504.000,- • For the construction and expansion of Kuala Tanjung Port Multipurpose Terminal, land acquisition for a public interest scheme covering an area of 3,279.97 m2 was conducted. The Kisaran District Court determined the consignment based on Kisaran District Court Decision No. 23/Pdt.P. Kons/2021/PN.Kis dated September 7, 2021. • The plaintiff objected to the compensation determination and filed a PMH lawsuit with Kisaran District Court with the following petition: a. Declaring Kisaran District Court Decision No. 23/Pdt.P. Kons/2021/PN.Kis null and void. b. Determining the compensation value for the acquisition of 3,279.97 m2 land and the building owned by the plaintiff at Rp10,533,504,000.

Tabel Perkara Hukum yang Dihadapi Perusahaan
Legal Cases Faced by the Company

Status Penyelesaian, Risiko, Nilai Gugatan Settlement Status, Risk, Lawsuit Amount	Pengaruhnya terhadap kondisi Perusahaan Impact on the Company's Condition
Penanganan perkara ini dilakukan secara Bersama-sama antara tim hukum Perseroan dengan Lawyer Hasil Penanganan: 1. Tingkat PN (Gugatan ditolak, Perseroan Menang) 2. Tingkat Banding (Menguatkan Putusan PN, Perseroan Menang) 3. Tingkat Kasasi (Menolak Permohonan Kasasi, Perseroan menang) Atas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 718 PK/Pdt/2025 Jo. Nomor 733 K/PDT/2024 Jo. Nomor 274/Pdt/2022/PT MDN Jo. Nomor 80/Pdt.G/2021/PN KIS tanggal 28 Juli 2025 sebagai berikut; 1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali JONNER SAMOSIR, tersebut; 2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); This case was handled collaboratively by the Company's legal team and the lawyer. Results: 1. District Court Level (Claim rejected, Company wins) 2. Appeal Level (Upholds District Court Decision, Company wins) 3. Cassation Level (Rejects Cassation Application, Company wins) Regarding the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 718 PK/Pdt/2025 in conjunction with Number 733 K/PDT/2024 in conjunction with Number 274/Pdt/2022/PT MDN in conjunction with Number 80/Pdt.G/2021/PN KIS dated July 28, 2025, as follows: 1. Rejects the judicial review application from the Petitioner for Judicial Review, JONNER SAMOSIR; 2. Order the Applicant for the Judicial Review to pay court costs at all levels of the court, which at the judicial review hearing amount to Rp2,500,000.00 (two million five hundred thousand rupiah);	Dengan adanya putusan PK maka perkara ini sudah dinyatakan berkekuatan hukum tetap, posisi PT Pelindo selaku Tergugat dinyatakan sebagai pihak pemenang With the PK decision, this case has been declared to have permanent legal force, the position of PT Pelindo as the Defendant is declared as the winning party.
Penanganan perkara ini dilakukan secara Bersama-sama antara tim hukum Perseroan dengan Lawyer Hasil Penanganan: 1. Tingkat PN (Gugatan ditolak, Perseroan Menang) 2. Tingkat Banding (Menguatkan Putusan PN, Perseroan Menang) 3. Tingkat Kasasi (Menolak Permohonan Kasasi, Perseroan menang) 4. Tingkat PK (menunggu putusan PK) This case was handled collaboratively by the Company's legal team and the lawyer. Results: 1. District Court Level (Claim rejected, Company wins) 2. Appeal Level (Upholds District Court Decision, Company wins) 3. Cassation Level (Cassation Application rejected, Company wins) 4. PK Level (awaiting PK decision)	Dengan adanya putusan kasasi maka perkara ini sudah dinyatakan berkekuatan hukum tetap, walaupun ada Upaya Peninjauan Kembali dari Pihak Penggugat dan posisi PT Pelindo selaku Tergugat dinyatakan sebagai pihak pemenang With the cassation decision, this case has been declared legally binding, despite the Plaintiff's judicial review, and PT Pelindo, as the Defendant, has been declared the winning party.

Tabel Perkara Hukum yang Dihadapi Perusahaan
Legal Cases Faced by the Company

No	Register, Locus Perkara dan Para Pihak Register, Case Locus and Parties	Pokok Perkara / Gugatan Subject Matter/Lawsuit
3	No. 43/G/2009/PTUN-MDN, tahun 2009 Locus di Pelabuhan Belawan - Medan (Sumatera Utara) PARA PIHAK 1. Penggugat : Tengku Aswandin 2. Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Medan 3. Tergugat II Intervensi : PT Pelindo No. 43/G/2009/PTUN-MDN, 2009 Location: Belawan Port - Medan (North Sumatra) PARTIES 1. Plaintiff: Tengku Aswandin 2. Defendant: Head of Medan Land Office 3. Intervening Defendant II: PT Pelindo Indonesia (Persero).	• Perihal gugatan adalah permohonan pembatalan Sertifikat Hak Pengelolaan No.1/Belawan I tanggal 03 Maret 1993 a.n PT Pelindo I (Persero) khusus terhadap tanah Penggugat seluas ± 66.800 m2, seluas 7.100 m2 dan seluas 10 Ha di Jalan Bagan Deli (Kampung Skoni) Labuhan Deli Kota Medan. PT Pelindo I (Persero) masuk sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara dimaksud, karena objek perkara tersebut diduga masuk dalam sertifikat PT Pelindo I (Persero) yakni HPL No.1/Belawan I, yang menjadi lokasi PT Prima Indonesia Logistik dan sebahagian saat ini lokasi masjid Graha Regional 1. • Dengan petitium yang pada intinya sebagai berikut : a. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) No: 1 Tahun 1993 Desa Belawan I seluas 278.15 Ha tertanggal 03 Maret 1993 Atas nama PT. Pelabuhan Indonesia (Persero). b. Mewajibkan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan) untuk mencabut Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) No : 1 Tahun 1993 Desa Belawan I seluas 278.15 Ha tertanggal 03 Maret 1993 Atas nama PT. Pelabuhan Indonesia (Persero). • The lawsuit concerns a request to cancel Management Rights Certificate No. 1/ Belawan I dated March 3, 1993, in the name of PT Pelindo I (Persero), specifically for the Plaintiff's land, covering approximately 66,800 m2, 7,100 m2, and 10 hectares on Jalan Bagan Deli (Kampung Skoni), Labuhan Deli, Medan City. PT Pelindo I (Persero) is the second intervening defendant in the case, as the case subject is allegedly included in PT Pelindo I's (Persero) certificate, namely Land Use Right No. 1/Belawan I, which is the location of PT Prima Indonesia Logistik and part of the current location of Graha Regional 1 Mosque. • With the following petition: a. Declare the Management Rights Certificate (HPL) No. 1 of 1993 for Belawan I Village, covering an area of 278.15 hectares, dated March 3, 1993, in the name of PT Pelabuhan Indonesia (Persero). b. Require the Defendant (Head of Medan City Land Office) to revoke the Management Rights Certificate (HPL) No. 1 of 1993 for Belawan I Village, covering an area of 278.15 hectares, dated March 3, 1993, in the name of PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Tabel Perkara Hukum yang Dihadapi Perusahaan
Legal Cases Faced by the Company

Status Penyelesaian, Risiko, Nilai Gugatan Settlement Status, Risk, Lawsuit Amount	**Pengaruhnya terhadap kondisi Perusahaan** Impact on the Company's Condition
Penanganan perkara ini dilakukan secara Bersama-sama antara tim hukum Perseroan dengan Lawyer Hasil Penanganan: 1. Tingkat PTUN (Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya, Perseroan Kalah) 2. Tingkat Banding PT TUN (Menguatkan Putusan PTUN, Perseroan Kalah) 3. Tingkat Kasasi (Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II, Perseroan Kalah) 4. Tingkat PK (Menolak Permohonan PK dari Pemohon PK I dan II, Perseroan Kalah) 5. Tingkat PK 2 (Menolak Permohonan PK 2 dari Pemohon PK I dan II, Perseroan Kalah) This case was handled collaboratively by the Company's legal team and lawyers. Results: 1. PTUN (Allegedly granted the Plaintiff's lawsuit; the Company lost) 2. PT TUN Appeal (Upheld the PTUN Decision; the Company lost)Cassation (Rejected the Cassation Application from Applicants I and II; the Company lost) 3. PK (Rejected the PK Application from Applicants I and II; the Company lost) 4. PK 2 (Rejected the PK 2 Application from Applicants I and II; the Company lost)	Dengan adanya putusan kasasi maka perkara ini sudah dinyatakan berkekuatan hukum tetap, walaupun ada Upaya Peninjauan Kembali (Sampai saat ini belum dilaksanakan eksekusi putusan oleh BPN Kantah Belawan) dan Perseroan dinyatakan sebagai pihak yang kalah. Catatan : Perkara NO, kajian keuangan sedang menunggu nilai depresiasi dari konsultan Mohon update untuk PK 3 With the cassation decision, this case has been declared legally binding, despite a judicial review (to date, the decision has not been executed by Belawan Land Agency), and the Company is declared the losing party. Note: Case NO, financial review is awaiting depreciation value from the consultant.

Tabel Perkara Hukum yang Dihadapi Perusahaan
Legal Cases Faced by the Company

No	Register, Locus Perkara dan Para Pihak Register, Case Locus and Parties	Pokok Perkara / Gugatan Subject Matter/Lawsuit
4	No.87/PDT.G/2021/PN.KIS, tanggal 25 Juli 2025 Locus di Kuala Tanjung, Kabupaten Asahan (Sumatera Utara) PARA PIHAK 1. Penggugat : Rusman 2. Tergugat I : PT Pelindo 1 3. Tergugat II : PT Prima Multi Terminal	Perihal gugatan adalah Bahwa sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan gugatan ini didaftarkan pada bulan Juli 2025, Tergugat II maupun Tergugat I tanpa izin atau persetujuan dari Penggugat telah meletakkan material seperti pancang beton, ban-ban bekas, dan bahan material lainnya di atas tanah milik Penggugat . Petitum pada intinya adalah sebagai berikut; 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 4.400 m² (empat ribu empat ratus meter persegi) yang terletak di Dusun III Alai, Desa Kuala Tanjung, Kec. Sei Suka, Kab. Batu Bara ; 3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang meletakkan dan/atau menyimpan bahan material di atas tanah milik Penggugat tanpa izin adalah perbuatan melawan hukum ; 4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk memindahkan seluruh bahan material pembangunan seperti pancang beton, ban-ban bekas, dan material lainnya dari tanah milik Penggugat yang terletak di Dusun III Alai Desa Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ; 5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil lain kepada Penggugat, dengan rincian sebagai berikut: 1) Biaya ganti rugi sewa tanah sebesar Rp. 810.000.000,- (delapan ratus sepuluh juta rupiah) ; 2) Biaya Ahli sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh rupiah) ; 3) Biaya akomodasi dan transportasi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ; 6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugían imateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) ; 7. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari jika lalai melaksanakan amar putusan sejak putusan berkekuatan hukum tetap The subject of the lawsuit is that from October 2018 until this lawsuit was filed in July 2025, Defendant II and Defendant I, without the Plaintiff's permission or consent, placed materials such as concrete piles, used tires, and other materials on the Plaintiff's land. The petition is essentially as follows: 1. Granting the Plaintiff's lawsuit in its entirety; 2. Declaring that the Plaintiff is the rightful owner of a plot of land measuring 4,400 m² (four thousand four hundred square meters) located in Dusun III Alai, Kuala Tanjung Village, Kec. Sei Suka, Batu Bara Regency; 3. Declares that the actions of Defendant I and Defendant II, both jointly and individually, in placing and/or storing materials on the Plaintiff's land without permission constitutes an unlawful act; 4. Orders Defendant I and Defendant II, jointly and severally, to remove all construction materials, such as concrete piles, used tires, and other materials, from the Plaintiff's land located in Dusun III Alai, Kuala Tanjung Village, Sei Suka District, Batu Bara Regency, no later than 7 (seven) days after this decision becomes legally binding; 5. Orders Defendant I and Defendant II, jointly and severally, to pay other material losses to the Plaintiff, as detailed below: 1) Land rental compensation of Rp810,000,000 (eight hundred and ten million rupiah); 2) Expert fees of Rp150,000,000 (one hundred and fifty rupiah); 3) Accommodation and transportation costs of Rp50,000,000 (fifty million rupiah); 6. Ordering Defendant I and Defendant II to pay immaterial damages to the Plaintiff in the amount of Rp2,000,000,000 (two billion rupiah); 7. Ordering the Defendants to pay a fine of Rp1,000,000 (one million rupiah) per day if they fail to implement the verdict from the date the verdict becomes legally binding.

Status Penyelesaian, Risiko, Nilai Gugatan Settlement Status, Risk, Lawsuit Amount	Pengaruhnya terhadap kondisi Perusahaan Impact on the Company's Condition
Penanganan perkara ini dilakukan secara Bersama-sama antara tim hukum Perseroan dengan Lawyer. Hasil Penanganan: Atas amar Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No.87/PDT.G/2021/PN.Kis tanggal 31 Oktober 2025 adalah sebagai berikut; MENGADILI: DALAM EKSEPSI • Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya; DALAM POKOK PERKARA • Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; • Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.454.500 (satu juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah); This case was handled jointly by the Company's legal team and the lawyers. Result: Kisaran District Court Decision No. 87/PDT.G/2021/PN.Kis dated October 31, 2025, is as follows: HAS JUDGED: IN EXCEPTION • Rejecting the exceptions of Defendant I and Defendant II in their entirety; IN THE MAIN CASE • Rejecting the Plaintiff's lawsuit in its entirety; • Ordering the Plaintiff to pay court costs of Rp1,454,500 (one million four hundred fifty-four thousand five hundred rupiah);	Dengan adanya putusan PN maka perkara ini sudah dinyatakan berkekuatan hukum tetap, dan posisi PT Pelindo selaku Tergugat dinyatakan sebagai pihak pemenang Penggugat menyatakan banding dan batas kontra memori banding tgl 08 Desember 2025. With the District Court's decision, this case has been declared legally binding, and PT Pelindo, as Defendant, is declared the winning party. The Plaintiff has filed an appeal, with the deadline for filing a counter-appeal is December 8, 2025.

Tabel Perkara Hukum yang Dihadapi Perusahaan
Legal Cases Faced by the Company

No	Register, Locus Perkara dan Para Pihak Register, Case Locus and Parties	Pokok Perkara / Gugatan Subject Matter/Lawsuit
	Nomor 281/Pdt.G/2019/PN.Mdn Locus di Pelabuhan Belawan - Medan (Sumatera Utara) PARA PIHAK 1. Penggugat : PT METITO INDONESIA 2. Tergugat : PT PELABUHAN INDONESIA (Persero)	Gugatan diajukan oleh PT Metito kepada PT. Pelindo, karena PT Pelindo dianggap melakukan wanprestasi atas Perjanjian Kerjasama Operasi yang mengakibatkan kerugian akibat investasi yang dilakukan tidak sebanding dengan pendapatan yang di raih oleh PT Metito. Petitum pada intinya ialah sebagai berikut : 1. Surat Perjanjian tentang Kerjasama Operasi Pengusahan air minum di Pelabuhan Belawan, Dumai, Tanjung Balai Karimun sah mengikat, sehingga tergugat sah dan meyakinan melakukan WANPRESTASI 2. Menyatakan pengakihran Perjanjian Kerjasama secara dini tertanggal 30 November 2015 berikut penegasan pengakihran tertanggal 29 Januari 2016 3. Tergugat membayar tagihan berupa : a. Des 15 –Jan 16 Rp249.210.646 b. Denda karena tidak membayar tagihan Periode Mei- Oktober 2015, Des 15, Jan 16 – 14 Feb 19 Rp285.795.323 4. Tergugat melaksankan ketentuan pasal 23 ayat (2) huruf b yaitu membeli dan membayar fasilitas penggugat di pelabuhan dumai sebesar Rp24.560.623.050 5. Tergugat mengganti biaya yang dilekuarkan penggugat 1 Feb 16 – 18 Feb 19 Rp2.186.000.962 6. Kerugian penggugat yang kehilangan pendapatan 1 feb 16- 31 Maret 19 Rp20.440.000.000 7. Mengganti pendapatan produksi Rp37.464.324.952 8. Dwangsom Rp100.000.000 Apabila terlambat dan lalai dalam memenuhi isi putusan 9. Perkara dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lanjutan.
5	Case No. 281/Pdt.G/2019/PN.Mdn Location: Belawan Port - Medan (North Sumatra) PARTIES 1. Plaintiff: PT METITO INDONESIA 2. Defendant: PT PELABUHAN INDONESIA (Persero)	PT Metito filed a lawsuit against PT Pelindo, alleging that PT Pelindo breached its obligations under the Joint Operation Agreement, resulting in losses due to investments disproportionate to the revenue earned by PT Metito. The petition is essentially as follows: 1. Agreement on the Joint Operation of Drinking Water Businesses at Belawan Port, Dumai, Tanjung Balai Karimun is legally binding, therefore the Defendant is legally and convincingly in BREACH OF PERFORMANCE. 2. Declaring early termination of the Cooperation Agreement dated November 30, 2015, along with confirmation of the termination dated January 29, 2016. 3. The Defendant pays the following bills: a. December 15–January 16: Rp249,210,646 b. Fine for failure to pay bills for the period May-October 2015, December 15, January 16 – February 14, 2019 Rp285,795,323 4. The defendant implemented the provisions of Article 23 paragraph (2) letter b, namely purchasing and paying for the plaintiff's facilities at Dumai Port in the amount of Rp24,560,623,050 5. The defendant reimbursed the plaintiff for costs incurred from February 1, 2016 – February 18, 2019 Rp2,186,000,962 6. The plaintiff's loss of income from February 1, 2016 – March 31, 2019 Rp20,440,000,000 7. Replacement of production income Rp37,464,324,952 8. Dwangsom Rp100,000,000 for delays and negligence in fulfilling the contents of the decision 9. The case was carried out first even though there were further legal efforts.

Tabel Perkara Hukum yang Dihadapi Perusahaan
Legal Cases Faced by the Company

Status Penyelesaian, Risiko, Nilai Gugatan Settlement Status, Risk, Lawsuit Amount	**Pengaruhnya terhadap kondisi Perusahaan** Impact on the Company's Condition
Setelah berjalannya proses litigasi/persidangan antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan Kasasi di Tingkat Mahkamah Agung, Kedua belah pihak sepakat damai dengan melalukan serah terima asset dari PT Metito ke PT Pelindo. 1. Status Penyerahan Aset per tgl 31 Oktober setiap Cabang a. Telah dilaksanakan serah terima aset cabang. Tanjung balai karimun b. Telah dilaksanakan serah terima aset Cabang Dumai c. Telah dilaksanakan serah terima aset Cabang Belawan dilaksanakan pada tanggal 07 Januari 2021,Namun s/d tanggal 30 Januari 2025 pihak metito belum menyerahkan Berita Acara serah terima aset kepada PT Pelindo Nb. Saat ini keuangan Reg 1 sedang melakukan kajian dengan konsultan untuk menilai depresiasi asset khususnya untuk tanjung balai karimun	Kedua belah pihak sepakat damai dengan pemberitahuan ke PN Medan dan PT Metito Menyerahkan Aset kepada PT Pelindo, sehingga PT Pelindo Tidak membayar nilai investasi / biaya kerugian yang dituntut oleh PT Metito sebelumnya. Departemen Aset Regional 1 menyampaikan bahwa Aset yang diserahkan PT Metito tidak dapat langsung dicatatakan sebagai asset PT Pelindo, karena nilainya sudah tidak ada sehingga membutuhkan pendapat hukum atau lainnya untuk proses pencatatan asset dimaksud Aset di rencanakan akan di pergunakan oleh mitra
Following the litigation/trial process between the Plaintiff and Defendant, up to and including the cassation appeal at the Supreme Court, both parties agreed to amicably transfer assets from PT Metito to PT Pelindo. 1. Asset Handover Status as of October 31st for each Branch a. Tanjung Balai Karimun Branch asset handover has been completed b. Dumai Branch asset handover has been completed c. Belawan Branch asset handover has been completed on January 7, 2021. However, as of January 30, 2025, Metito has not submitted the asset handover report to PT Pelindo. Note: Currently, the Financial Division of Reg 1 is conducting a review with a consultant to assess asset depreciation, specifically for Tanjung Balai Karimun.	Both parties agreed to amicably transfer assets by notifying Medan District Court and PT Metito handing over the assets to PT Pelindo. Therefore, PT Pelindo will not pay the investment value or loss costs previously claimed by PT Metito. The Regional Assets Department 1 stated that the assets handed over by PT Metito cannot be immediately recorded as PT Pelindo assets, as their value is no longer available. Therefore, legal or other opinions are required for the asset recording process. The assets are planned to be used by partners.

Tabel Perkara Hukum yang Dihadapi Perusahaan
Legal Cases Faced by the Company

No	Register, Locus Perkara dan Para Pihak Register, Case Locus and Parties	Pokok Perkara / Gugatan Subject Matter/Lawsuit
6	No. 595/Pdt.G/2025/PN Jkt.Utr tanggal 16 September 2025 Locus di Jakarta Utara (DKI Jakarta) PARA PIHAK Penggugat : Nasih Binti Melan Tergugat : 1. Lurah Cilincing 2. Kepala Kantor Petanahan Kota Administrasi Jakarta Utara Turut Tergugat: 1. PT Pelindo 2. Panianti 3. Sri Suryaningsih 4. Fatima 5. Ali Ibrahim 6. Umar Syamdaru	• Sengketa tanah adat seluas ±50.000 m² di Kelurahan Cilincing, Jakarta Utara, yang diklaim Penggugat Nasih Binti Melan sebagai ahli waris sah Sanip bin Salim berdasarkan hak milik adat (Letter C No.124). • Tanah tersebut dinyatakan tumpang tindih dengan tanah pihak lain (Letter C No.125 & C 336) oleh Lurah Cilincing dan BPN Jakarta Utara, serta masuk dalam rencana pengadaan tanah untuk proyek akses Pelabuhan Tanjung Priok oleh PT Pelindo. • Penggugat menilai pencatatan tanah garapan/partikelir sebagai tanah adat adalah cacat hukum dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), serta menuntut penegasan kepemilikan tanah, pembatalan pencatatan pihak lain, serta ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp10 miliar. Inti dari Petitum sebagai berikut : 1. Menyatakan tanah sengketa seluas ± 50.000 m² di Kelurahan Cilincing Jakarta Utara, benar merupakan tanah adat/turun-temurun milik Penggugat, yang tidak berasal dari tanah garapan; 2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang membiarkan timbulnya tumpang tindih pencatatan tanah antara tanah Penggugat dengan tanah Turut Tergugat II s/d VI merupakan Perbuatan Melawan Hukum; 3. Menyatakan bahwa tanah sengketa a quo apabila terkena proyek pembebasan lahan untuk kepentingan umum (Jalan Akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru ke Tol Cibitung-Cilincing) yang dilaksanakan oleh PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) sebagai Turut Tergugat I, maka pembayaran ganti rugi wajib dibayarkan oleh PT. Pelindo langsung kepada Penggugat sebagai ahli waris sah pewaris tanah adat; 4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I (PT. Pelindo) untuk secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Penggugat berupa: a. Ganti kerugian materiil sebesar Rp10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah) atau jumlah lain yang ditentukan berdasarkan hasil appraisal yang ditunjuk Pengadilan; b. Ganti kerugian immateriil sebesar Rp5.000.000.000,- (Lima miliar rupiah) karena timbulnya penderitaan batin, hilangnya rasa aman, dan ketidakpastian hukum atas hak tanah Penggugat; 5. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini; No. 595/Pdt.G/2025/PN Jkt.Utr dated September 16, 2025 Location: North Jakarta (DKI Jakarta) PARTIES Plaintiff: Nasih Binti Melan Defendant: 1. Cilincing Village Head 2. Head of North Jakarta City Land Office Co-Defendants: 1. PT Pelindo 2. Panianti 3. Sri Suryaningsih 4. Fatima 5. Ali Ibrahim 6. Umar Syamdaru	• Dispute over customary land covering approximately 50,000 m² in Cilincing Village, North Jakarta, which Plaintiff Nasih Binti Melan claims as the legal heir of Sanip bin Salim based on customary ownership rights (Letter C No. 124). • The land was declared to overlap with another party's land (Letter C No. 125 & C 336) by Cilincing Village Head and North Jakarta National Land Agency (BPN), and was included in the land acquisition plan for Tanjung Priok Port access project by PT Pelindo. • The Plaintiff believes the registration of the cultivated/private land as customary land is legally flawed and constitutes an Unlawful Act (PMH). They demand confirmation of land ownership, cancellation of the other party's registration, and material and immaterial compensation of Rp10 billion. The essence of the Petition is as follows: 1. Declaring that the disputed land, approximately 50,000 m² in Cilincing Village, North Jakarta, is indeed customary/hereditary land belonging to the Plaintiff, which does not originate from cultivated land; 2. Declare that the actions of Defendant I and Defendant II, allowing overlapping land registration between the Plaintiff's land and the land of Co-Defendants II to VI, constitute an Unlawful Act; 3. Declare that if the disputed land a quo is affected by the land acquisition project for public interest (the New East Tanjung Priok Port Access Road to Cibitung-Cilincing Toll Road) implemented by PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) as Co-Defendant I, PT. Pelindo must pay compensation directly to the Plaintiff as the legal heir to the customary land; 4. Order Defendant I, Defendant II, and Co-Defendant I (PT. Pelindo) to jointly and severally pay compensation to the Plaintiff in the following manner: a. Compensation for material losses in the amount of Rp10,000,000,000 (Ten billion rupiah) or another amount determined based on the results of an appraisal appointed by the Court; b. Immaterial compensation of Rp5,000,000,000 (five billion rupiah) due to the mental suffering, loss of security, and legal uncertainty regarding the Plaintiff's land rights; 5. Ordering the Defendants and Co-Defendants to submit to and obey this decision;

Status Penyelesaian, Risiko, Nilai Gugatan Settlement Status, Risk, Lawsuit Amount	Pengaruhnya terhadap kondisi Perusahaan Impact on the Company's Condition
Penanganan perkara ini dilakukan oleh tim hukum Perseroan. Hasil Penanganan: 1. Tanggal 3 Desember 2025: Pembacaan Surat Gugatan dan penentuan agenda berikut nya yaitu Jawaban, Replik dan Duplik (E-Court). 2. E-Court dimulai 17 Desember 2025 This case is being handled by the Company's legal team. Results: 1. December 3, 2025: Reading of the Lawsuit and determination of the next agenda: Response, Reply, and Duplicate (E-Court). 2. E-Court begins December 17, 2025	• Tanah sengketa masuk proyek akses Pelabuhan Tanjung Priok, Pelindo bisa diwajibkan langsung membayar ganti rugi kepada penggugat. • Reputasi dan keberlanjutan proyek strategis (akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru) dapat terdampak oleh adanya sengketa hukum ini. • The disputed land is included in Tanjung Priok Port access project. Pelindo may be required to pay direct compensation to the plaintiff. • The reputation and sustainability of the strategic project (New East Tanjung Priok Port access) may be impacted by this legal dispute.

Tabel Perkara Hukum yang Dihadapi Perusahaan
Legal Cases Faced by the Company

No	Register, Locus Perkara dan Para Pihak Register, Case Locus and Parties	Pokok Perkara / Gugatan Subject Matter/Lawsuit
	No. 747/Pdt.G/2025/PN Jkt.Utr tanggal 5 November 202 Locus di Jakarta Utara (DKI Jakarta) PARA PIHAK Penggugat : PT Intra Faedah Utama Tergugat : PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok Turut Tergugat: Badan Karantina Indonesia	Inti dari Petitum sebagai berikut : 1. Menyatakan Surat Perjanjian tentang Penggunaan Bagian Tanah Hak Pengelolaan PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Tanjung Priok dengan PT. Intra Faedah Utama, dengan nomor-nomor, sebagai berikut: a. Nomor : HK.566/15/16/C.TPK-01., tanggal 31 Desember 2001 (Surat Perjanjian Blok C). b. Nomor : HK.566/11/16/C.TPK-00., tanggal 6 September 2000 (Surat Perjanjian Blok D) Adalah Sah dan Mengikat bagi Penggugat dan Tergugat. 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji / Wanprestasi. 3. Menghukum Tergugat untuk membayar Ganti Kerugian Materiil kepada Penggugat sebesar Rp110.900.000.000,- (seratus sepuluh milyar sembilan ratus juta rupiah), secara sekaligus dan seketika, dengan perincian sebagai berikut : - a. Lahan yang terletak di Blok D dan Blok C seluas 2.000 M?2; (dua ribu meter persegi) seharusnya akan dipergunakan dan dimanfaatkan Penggugat untuk membangun 33 (tiga puluh tiga) unit sebesar Rp85.800.000.000,- (delapan puluh lima milyar delapan ratus juta rupiah). b. Biaya Relokasi dan Pengosongan penghuni illegal / liar yang berada di sekitar lahan yang dipergunakan oleh Penggugat sebesar Rp10.000.0000.000,- (sepuluh milyar rupiah). c. Biaya Jasa Konsultan dan Kontraktor untuk Pekerjaan Pembersihan, Pengurukan, Pemadatan, dan Pemindahan Tanaman di lokasi Ex. Taman Kota, Pembangunan dalam rangka Penataan untuk mendapatkan jalan dan gerbang akses pintu keluar dan pintu masuk ke jalan raya seluas lahan yang terletak di lokasi Blok D, Pemindahan dan Penanaman ulang tanaman sebanyak 1.000 (seribu) pohon untuk tanaman di Jalan Enggano, serta Biaya Pemindahan Gardu Induk PLN untuk kepentingan Tergugat sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah). d. Biaya pengukuran ulang atas lahan yang telah diberikan Tergugat untuk dipergunakan Penggugat yang dilakukan oleh Pihak Surveyor sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah). 4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara Imateriil sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)
6	No. 747/Pdt.G/2025/PN Jkt.Utr dated November 5, 2025 Location: North Jakarta (DKI Jakarta) PARTIES Plaintiff: PT Intra Faedah Utama Defendant: PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok Co-Defendant: Indonesian Quarantine Agency	The essence of the Petition is as follows: 1. Declaring that the Agreement regarding the Use of a Portion of Land with Management Rights of PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Tanjung Priok Branch with PT. Intra Faedah Utama, with the following numbers: --- a. Number: HK.566/15/16/C.TPK-01., dated December 31, 2001 (Block C Agreement). b. Number: HK.566/11/16/C.TPK-00., dated September 6, 2000 (Block D Agreement) Is valid and binding on the Plaintiff and Defendant. 2. Declares the Defendant to have committed a breach of promise/breach of contract. 3. Orders the Defendant to pay material damages to the Plaintiff in the amount of Rp110,900,000,000 (one hundred ten billion nine hundred million rupiah), in a lump sum, with the following details: - a. The land located in Block D and Block C, covering an area of 2,000 m² (two thousand square meters), should have been used and utilized by the Plaintiff to build 33 (thirty-three) units for Rp85,800,000,000 (eighty-five billion eight hundred million rupiah). b. Relocation and eviction costs for illegal occupants residing around the land used by the Plaintiff amounting to Rp10,000,000,000 (ten billion rupiah). c. Consultant and Contractor fees for cleaning, backfilling, compaction, and plant removal at the former City Park site, construction for the purpose of providing access roads and gates for the exit and entrance to the main road covering an area of land located in Block D, relocation and replanting of 1,000 (one thousand) trees for planting on Jalan Enggano, and relocation of PLN substation for the Defendant's benefit amounting to Rp15,000,000,000 (fifteen billion rupiah). d. Re-measurement costs for the land provided by the Defendant for the Plaintiff's use, carried out by the Surveyor, amounting to Rp100,000,000 (one hundred million rupiah). 4. Order the Defendant to pay immaterial compensation to the Plaintiff in the amount of Rp10,000,000,000 (ten billion rupiah).

Status Penyelesaian, Risiko, Nilai Gugatan Settlement Status, Risk, Lawsuit Amount	**Pengaruhnya terhadap kondisi Perusahaan** Impact on the Company's Condition
Penanganan perkara ini dilakukan oleh tim hukum Perseroan. Hasil Penanganan: 1. Tanggal 19 November 2025: Sidang Pertama 2. Tanggal 3 Desember 2025: Kehadiran Pelindo tidak dianggap hadir karena tidak ada Surat Kuasa Khusus. 3. Sidang berikutnya :10 Desember 2025 harus membawa Surat Kuasa This case is being handled by the Company's legal team. Results: 1. November 19, 2025: First Hearing 2. December 3, 2025: Pelindo's presence is not considered due to the lack of a Special Power of Attorney. 3. Next hearing: December 10, 2025, must bring a Power of Attorney	

Tabel Perkara Hukum yang Dihadapi Perusahaan
Legal Cases Faced by the Company

No	Register, Locus Perkara dan Para Pihak Register, Case Locus and Parties	Pokok Perkara / Gugatan Subject Matter/Lawsuit
7	No. 41/Pdt.G/2025/PN Cbn Locus di Cirebon PARA PIHAK Penggugat : Nurdin Tergugat : 1. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) 2. PT Pelindo Regional 2 Cabang Cirebon 3. PT Terbit Jaya Selaras Energi Turut Tergugat : Pemerintah Daerah Kota Cirebon No. 41/Pdt.G/2025/PN Cbn Location: Cirebon PARTIES Plaintiff: Nurdin Defendant: 1. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) 2. PT Pelindo Regional 2 Cirebon Branch 3. PT Terbit Jaya Selaras Energi Co-Defendant: Cirebon City Government	Relaas Panggilan Kepada Tergugat (Surat Tercatat) No: 41/Pdt.G/2025/PN Cbn tanggal 22 Mei 2025. Untuk hadir menghadap Persidangan Umum Pengadilan Negeri Ciberon dalam Perkara Perdata Nomor: 41/Pdt.G/2025/PN Cbn tanggal 22 Mei 2025 dan disebut sebagai Tergugat. Summary to Defendant (Registered Letter) No. 41/Pdt.G/2025/PN Cbn dated May 22, 2025, to appear before Cirebon District Court in Civil Case Number 41/Pdt.G/2025/PN Cbn dated May 22, 2025, and referred to as Defendant.

Tabel Perkara Hukum yang Dihadapi Perusahaan
Legal Cases Faced by the Company

Status Penyelesaian, Risiko, Nilai Gugatan Settlement Status, Risk, Lawsuit Amount	**Pengaruhnya terhadap kondisi Perusahaan** Impact on the Company's Condition
Penanganan perkara ini dilakukan secara bersama-sama antara tim hukum Perseroan dengan JPN Kejaksaan Negeri Cirebon berdasarkan MoU Nomor: HK.03/23/4/2/B1.1/GM/CRBN-25 dan Nomor: B-1122/M.2.11/Gs/04/2025. Hasil Penanganan: 1. Putusan Pada Tingkat Pertama Pengadian Negeri Cirebon menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima; 2. Penyampaian Kontra Memori Banding pada tanggal 23 Januari 2026. This case was handled jointly by the Company's legal team and the Cirebon District Attorney's Office, based on Memorandum of Understanding (MoU) No. HK.03/23/4/2/B1.1/GM/CRBN-25 and No. B-1122/M.2.11/Gs/04/2025. Results: 1. Cirebon District Court's first-instance decision declared the Plaintiff's lawsuit inadmissible; 2. Submission of the Counter-Appeal Memorandum on January 23, 2026.	Tidak ada implikasi karena wilayah stockpile saat ini sudah kosong There are no implications because the stockpile area is currently empty.

Tabel Perkara Hukum yang Dihadapi Perusahaan
Legal Cases Faced by the Company

No	Register, Locus Perkara dan Para Pihak Register, Case Locus and Parties	Pokok Perkara / Gugatan Subject Matter/Lawsuit
8	No. 55/Pdt.G/2025/PN Bgl tanggal 14 Agustus 2025 Locus di Bengkulu PARA PIHAK 1. Penggugat : PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Bengkulu 2. Tergugat : a. Epan Saputra b. Hartati c. A Sukri d. M Ramadhan e. Susmayanti f. Milus g. Kamil Darwis h. Masni Siregar i. Eka Muliyanti j. Bahermasyah k. Sri Susilowati l. Sultan Efendi m. Fitma Susanti n. Reno Susanto o. Nur Aini p. Ario Syaputra q. Yudi Mare r. Sumaryadi s. Roli Agustion t. Selfia Julianti u. Edina Sinaga v. A Feriansah w. Devran Ronaldo No. 55/Pdt.G/2025/PN Bgl dated August 14, 2025 Location: Bengkulu PARTIES 1. Plaintiff: PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Bengkulu 2. Defendant: a. Epan Saputra b. Hartati c. A. Sukri d. M. Ramadhan e. Susmayanti f. Milus g. Kamil Darwis h. Masni Siregar i. Eka Muliyanti j. Bahermasyah k. Sri Susilowati l. Sultan Efendi m. Fitma Susanti n. Reno Susanto o. Nur Aini p. Ario Syaputra q. Yudi Mare r. Sumaryadi s. Roli Agustion t. Selfia Julianti u. Edina Sinaga v. A. Feriansah w. Devran Ronaldo	PT Pelabuhan Indoneisa (Pesero) Regional 2 Bengkulu memohon pendampingan kepada Jaksa Penngacara Negara Kejaksaan Tinggi Bengkulu agar dapat diberikan antuan Hukum untuk mengajukan gugatan eksekusi pengosongan lahan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Bengkulu requested from the State Attorney at the Bengkulu High Prosecutor's Office for legal assistance in filing a lawsuit to vacate the land.

Tabel Perkara Hukum yang Dihadapi Perusahaan
Legal Cases Faced by the Company

Status Penyelesaian, Risiko, Nilai Gugatan Settlement Status, Risk, Lawsuit Amount	**Pengaruhnya terhadap kondisi Perusahaan** Impact on the Company's Condition
Penanganan perkara ini dilakukan secara Bersama-sama antara tim hukum Perseroan dengan JPN Kejaksaan Tinggi Bengkulu berdasarkan MoU nomor : HK.03/26/9/1/B.1.1/GM/C.BKL-24 dan nomor B-25/L.7/Gs.2/09/2024 Hasil Penanganan: Tingkat PN dengan Agenda Persidangan : 1. Tanggal 5 November 2025: Penyampaian Duplik Tergugat (E-Court). 2. Tanggal 12 November 2025: Pemeriksaan Bukti Surat Penggugat. 3. Tanggal 19 November 2025: Bukti Surat dari Tergugat. 4. Tanggal 26 November 2025: Penyampaian Perbaikan Bukti Surat. 5. Tanggal 3 Desember 2025: Sidang keterangan Saksi. 6. Tanggal 9 Desember 2025: Pemeriksaan Saksi This case was handled jointly by the Company's legal team and Bengkulu High Prosecutor's Office (JPN) based on Memorandum of Understanding (MoU) No. HK.03/26/9/1/B.1.1/GM/C.BKL-24 and No. B-25/L.7/Gs.2/09/2024. Handling Results: District Court Level with Trial Agenda: 1. November 5, 2025: Submission of Defendant's Duplicate (E-Court). 2. November 12, 2025: Examination of Plaintiff's Documentary Evidence. 3. November 19, 2025: Documentary Evidence from Defendant. 4. November 26, 2025: Submission of Amended Documentary Evidence. 5. December 3, 2025: Witness Testimony Hearing. 6. December 9, 2025: Witness Examination	Perusahaan tidak dapat menguasai aset yang dikelola. The company cannot control the assets under management.

Tabel Perkara Hukum yang Dihadapi Perusahaan
Legal Cases Faced by the Company

No	Register, Locus Perkara dan Para Pihak Register, Case Locus and Parties	Pokok Perkara / Gugatan Subject Matter/Lawsuit
	No. 87/Pdt.G/2025/PN Jmb Locus di Jambi PARA PIHAK Penggugat : 1. Siti Aisyah 2. Emi Musriyeni Binti Mustofa Kamal 3. Nuryazi 4. Amriyani Binti Makmun A. Syukur 5. M. Firdaus Firmansyah Bin Makmun A. Syukur 6. Nining Marlina Mawahda Binti Makmun A. Syukur Tergugat : Pemerintah Provinsi Jambi Turut Tergugat : 1. PT Eraguna Bumi Nusa (EBN) 2. Pemerintah Kota Jambi 3. PT Pelabuhan Indonesia Cabang Jambi 4. Polda Jambi Cq. Ditpolairud Polda Jambi 5. DPRD Provinsi Jambi	• Bahwa Para Penguggat merupakan Ahli Waris dan pemilik sah atas sebidang tanah seluas 13.530 M2 yang terletak di Kampung Pulau Pandan. • Bahwa sebagian tanah tersebut masuk dalam area pembangunan Pasar Angso Duo dan Gedung Polairud oleh Tergugat pada tahun 2020. • Bahwa pembangunan Pasar Angso Duo tersebut dikerjakan oleh Turut Tergugat I setelah mendapatkan IMB dari Turut Tergugat II (Perjanjian Pola Bangun Guna Serah antara Tergugat dan Turut Tergugat I). • Bahwa pembangunan Pasar Angso Duo dan Gedung Polairud oleh Tergugat yang diklaim dibangun di atas lahan milik Para Pengugat dan Para Penggugat menuntut ganti rugi/kompensasi kepada Tergugat untuk membayar Rp13.530.000.000. • Bahwa berdasarkan keterangan dari Para Penggugat, lahan tersebut tidak termasuk lahan eks Pelindo Jambi yang menjadi objek tukar guling dengan Tergugat, karena lahan yang menjadi objek tukar guling antara Tergugat dan Turut Tergugat III (PT Pelindo Jambi) letaknya jauh dengan Objek Perkara • Inti dari Petitum : a. Menyatakan Objek Perkara lahan seluas 13.530 m2 yang terletak di Puau Pandan RT.30 Kelurahan Gok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi adalah tanah hak milik Para Penggugat (Ahli Waris). b. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. c. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini. d. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini
9	No. 87/Pdt.G/2025/PN Jmb Location: Jambi PARTIES Plaintiff: 1. Siti Aisyah 2. Emi Musriyeni, daughter of Mustofa Kamal 3. Nuryazi 4. Amriyani, daughter of Makmun A. Syukur 5. M. Firdaus Firmansyah, son of Makmun A. Syukur 6. Nining Marlina Mawahda, daughter of Makmun A. Syukur Defendant: Jambi Provincial Government Co-Defendants: 1. PT Eraguna Bumi Nusa (EBN) 2. Jambi City Government 3. PT Pelabuhan Indonesia, Jambi Branch 4. Jambi Regional Police, cq. Jambi Regional Police Water Police Directorate 5. Jambi Provincial DPRD	• That the Plaintiffs are the heirs and legal owners of a 13,530 m2 plot of land located in Kampung Pulau Pandan. • That part of the land is included in the construction area the Angso Duo Market and Polairud Building by the Defendant in 2020. • That the construction of Angso Duo Market was carried out by Co-Defendant I after obtaining a Building Permit (IMB) from Co-Defendant II (Build Operate Transfer Agreement between the Defendant and Co-Defendant I). • That the construction of Angso Duo Market and Polairud Building by the Defendant is claimed to be built on land owned by the Plaintiffs and the Plaintiffs are demanding compensation from the Defendant to pay Rp13,530,000,000. • Based on the Plaintiffs' statements, the land in question is not part of the former Pelindo Jambi land that was the subject of the exchange with the Defendant, as the land that was the subject of the exchange between Defendant and Co-Defendant III (PT Pelindo Jambi) is located far from the Object of the Case. • Essence of the Petition: a. Declares that the Object of the Case, 13,530 m2 of land located in Puau Pandan RT. 30, Gok Village, Danau Sipin District, Jambi City, is land owned by the Plaintiffs (Heirs). b. Declares that the Defendant has committed an Unlawful Act. c. Orders the Defendant and Co-Defendants to submit to and comply with the decision of this case. d. Orders the Defendant and Co-Defendants to pay all costs incurred in this case.
	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor Register Perkara 654/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst jo. 387/PDT/2020/PT.DKI Locus Pelabuhan Tanjung Perak PARA PIHAK : 1. Penggugat : PT Trimitra Samudra 2. Tergugat : PT Pasifik Abadi 3. Turut Tergugat : Kemenhub, PT Pelindo, Irwansyah dan Asep Hartno	Gugatan Perdata oleh PT Trimirta Samudera kepada PT Pelindo selaku Turut Tergugat terkait dengan kapal Penggugat yang tenggelam akibat bertubrukan dengan anchor pile kapal milik Tergugat di area Pelabuhan Tanjung Perak. PT Pelindo hanya diminta untuk tunduk dan patuh pada isi putusan, tidak ada dampak materil kepada PT Pelindo.
10	Central Jakarta District Court Case Registration Number 654/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst jo. 387/PDT/2020/PT.DKI Location: Tanjung Perak Port PARTIES: 1. Plaintiff: PT Trimitra Samudra 2. Defendant: PT Pasifik Abadi 3. Co-Defendants: Ministry of Transportation, PT Pelindo, Irwansyah, and Asep Hartno	Civil lawsuit filed by PT Trimitra Samudera against PT Pelindo, as Co-Defendant, related to the Plaintiff's vessel that sank after colliding with the Defendant's anchor pile in the Tanjung Perak Port area. PT Pelindo was only asked to comply with the verdict; there were no material consequences for PT Pelindo.

Tabel Perkara Hukum yang Dihadapi Perusahaan
Legal Cases Faced by the Company

Status Penyelesaian, Risiko, Nilai Gugatan Settlement Status, Risk, Lawsuit Amount	**Pengaruhnya terhadap kondisi Perusahaan** Impact on the Company's Condition
Penanganan perkara ini dilakukan oleh tim hukum Perseroan. Hasil Penanganan: 1. Tanggal 20 Oktober 2025: Pembacaan Putusan Sela dengan amar putusan: Mengadili: Menolak Eksepsi Kompetensi Tergugat; a. Menyatakan Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili perkara ini; b. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melnjutkan persidangan; c. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir. 2. Tanggal 3 November 2025: Penyampaian Alat Bukti Dokumen oleh Penggugat (E-Court). 3. Tanggal 17 November 2025: Penyampaian Alat Bukti Dokumen oleh Tergugat dan Turut Tergugat (E-Court). 4. Tanggal 21 November 2025: Pelaksanaan Pemeriksaan setempat. 5. Tanggal 24 November 2025: Penyampaian kekurangan alat bukti oleh Tergugat dan Turut Tergugat IV. 6. Tanggal 1 Desember: Menghadirkan saksi dari Penggugat. 7. Tanggal 8 Desember 2025: Menghadirkan Saksi dari Penggugat. Agenda selanjutnya akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember dengan agenda Menghadirkan saksi dari Penggugat, Tergugat , dan Turut Tergugat 3. This case is being handled by the Company's legal team. Results: 1. October 20, 2025: Announcement of the Interim Decision with the following rulings: Judging: Rejecting the Defendant's Competency Exception; a. Declaring that Jambi District Court has the authority to hear this case; b. Ordering both parties to continue the trial; c. Suspending court costs until the final decision. 2. November 3, 2025: Submission of Documentary Evidence by the Plaintiff (E-Court). 3. November 17, 2025: Submission of Documentary Evidence by the Defendant and Co-Defendants (E-Court). 4. November 21, 2025: Implementation of On-site Examination. 5. November 24, 2025: Submission of insufficient evidence by Defendant and Co-Defendant IV. 6. December 1: Presentation of witnesses from the Plaintiff. 7. December 8, 2025: Presentation of witnesses from the Plaintiff. 8. The next agenda item will be held on December 15 with the agenda of presenting witnesses from the Plaintiff, Defendant, and Co-Defendant 3.	Perushaan kehilangan asset yang dikelola. The company lost assets under its management
Penanganan Perkara dilakukan Tim Hukum Internal Pelindo Regional 3 Hasil Penanganan : 1. Tingkat PN : Tergugat Melakukan Perbuatan Melawan Hukum, Menghukum Tergugat membayar Rp 87.730.983 ke Penggugat 2. Tingkat PT : Menguatkan Putusan PN 3. Kasasi : Dalam Proses Kasasi (menunggu putusan kasasi) The case is handled by Pelindo Regional 3 Internal Legal Team. Results: 1. District Court Level: Defendant Committed Unlawful Acts, Ordered Defendant to pay Rp87,730,983 to Plaintiff. 2. High Court Level: Upheld District Court Decision. 3. Cassation: In the cassation process (awaiting cassation decision).	-

Tabel Perkara Hukum yang Dihadapi Perusahaan
Legal Cases Faced by the Company

No	Register, Locus Perkara dan Para Pihak Register, Case Locus and Parties	Pokok Perkara / Gugatan Subject Matter/Lawsuit
11	Pengadilan Negeri Surabaya Nomor Regiser Perkara 697/Pdt.Bth/2022/PN.Sby jo 190/PDT/2023/PT.Sby Locus Pelabuhan Banyuwangi Para Pihak : 1. Penggugat : Budiarto Tanuharjo 2. Tergugat : I PT Timur Nusantara, II PT Pelindo Surabaya District Court Case Registration Number 697/Pdt.Bth/2022/PN.Sby in conjunction with 190/PDT/2023/PT.Sby Location: Banyuwangi Port Parties: 1. Plaintiff: Budiarto Tanuharjo 2. Defendant: I PT Timur Nusantara, II PT Pelindo	Gugatan Perlawanan Pihak ketiga (derden verzet) oleh PT Timur Nusantara yang diajukan oleh Budiarto Tanojohardjo di Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor register 697/Pdt.Bth/2022/PN.Sby terkait dengan perlawanan terhadap eksekusi putusan perkara nomor 716K/Pdt/2011 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya nomor: 395/Pdt./2010 PT.SBY jo. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor: 196/Pdt.G/2009/PN.Sby dan Penetapan Perintah Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 8 Agustus Nomor 06/Eks/2018/PN.Sby Terhadap eksekusi 1 unit Reach-Stacker milik PT Timur Nusantara Third Party Objection Lawsuit (derden verzet) by PT Timur Nusantara filed by Budiarto Tanujohardjo at Surabaya District Court under registration number 697/Pdt.Bth/2022/PN.Sby regarding the objection to the execution of decision number 716K/Pdt/2011 in conjunction with Surabaya High Court Decision number 395/Pdt./2010 PT.SBY in conjunction with Surabaya District Court Decision Number 196/Pdt.G/2009/PN.Sby and the Surabaya District Court's Order of Execution Seizure dated August 8, Number 06/Eks/2018/PN.Sby, regarding the seizure of one Reach-Stacker unit belonging to PT Timur Nusantara.
12	Pengadilan Negeri Surabaya Nomor Register Perkara 294/Pdt.G/2025/PN Sby Locus Ex. JMP 2 Para Pihak : 1. Penggugat : Fatchiyah Alamudi, dkk 2. Tergugat : PT Lamicitra Nusantara 3. Turut Tergugat : PT Pelindo Surabaya District Court Case Registration Number 294/Pdt.G/2025/PN Sby Location: Ex. JMP 2 Parties: 1. Plaintiff: Fatchiyah Alamudi, et al. 2. Defendant: PT Lamicitra Nusantara 3. Co-Defendant: PT Pelindo	PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional III Pelabuhan Tanjung Perak sebagai Turut Tergugat I karena kedudukan PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) sebagai pemilik tanah Hak Pengelolaan (HPL) yang diatasnya dahulu berdiri bangunan Jembatan Merah Plaza II (JMP 2), yang dikerjasamakan dengan PT. Lamicitra Nusantara selaku Tergugat I. PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional III Tanjung Perak Port is named as Co-Defendant I due to its position as the owner of Land Management Rights (HPL) upon which Jembatan Merah Plaza II (JMP 2) building was formerly located, in cooperation with PT. Lamicitra Nusantara as Defendant I.
13	Pengadilan Negeri Cibinong Nomor Register Perkara No 50/Pdt.Bth/2023/PN.Cbi jo 599/PDT/2024/PT.BDG Locus Pelabuhan Semarang Para Pihak Pemohon : PT Pelindo Termohon : Robertus Waropea dkk Cibinong District Court Case Registration Number 50/Pdt.Bth/2023/PN.Cbi jo 599/PDT/2024/PT.BDG Location: Semarang Port Parties Petitioner: PT Pelindo Respondent: Robertus Waropea et al.	Upaya perlawanan atas eksekusi beberapa besi milik PT Pelindo yang diklaim oleh Pihak lain merupakan besi hibah ex PT Freeport berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 31/Pdt.G/2017/PN Cbi Tanggal 19 Oktober 2017 Jo. Berita acara pencocokan obyek eksekusi Nomor 1/Pdt.Eks.Del/2020/PN.Sm jo. Nomor 27/Pen.Pdt/Eks/2018/PN.Cbi Nomor perkara 50/Pdt.Bth/2023/PN.Cbi. An opposition to the execution of several iron assets owned by PT Pelindo, which are claimed by another party to be donated iron ex–PT Freeport, based on Cibinong District Court Decision No. 31/Pdt.G/2017/PN Cbi dated October 19, 2017, in conjunction with the Minutes of Matching the Execution Object No. 1/Pdt.Eks.Del/2020/PN.Sm jo. No. 27/Pen.Pdt/Eks/2018/PN.Cbi, Case No. 50/Pdt.Bth/2023/PN.Cbi.

Tabel Perkara Hukum yang Dihadapi Perusahaan
Legal Cases Faced by the Company

Status Penyelesaian, Risiko, Nilai Gugatan Settlement Status, Risk, Lawsuit Amount	**Pengaruhnya terhadap kondisi Perusahaan** Impact on the Company's Condition
Penanganan Perkara dilakukan Tim Hukum Internal Pelindo Regional 3 Hasil Penanganan : 1. Tingkat PN : Menyatakan Gugatan Tidak Dapat diterima (Pelindo Menang) 2. Tingkat PT : Menguatkan Putusan PN (Pelindo Menang) 3. Tingkat Kasasi : Menolak Permohonan Kasasi (Pelindo Menang) 4. Tingkat PK : Perkara masih dalam proses PK (Peninjauan Kembali) The case is handled by Pelindo Regional 3 Internal Legal Team. Results: 1. District Court Level: Declared the Claim Inadmissible (Pelindo Wins) 2. High Court Level: Affirmed the District Court Decision (Pelindo Wins) 3. Cassation Level: Rejected the Cassation Request (Pelindo Wins) 4. Judicial Review Level: The case is still in the judicial review process.	Perusahaan kehilangan aset yang dikelola. The company lost assets under its management.
Penanganan Perkara dilakukan Tim Hukum Internal Pelindo Regional 3. Hasil Penanganan : • Sidang lanjutan dengan Agenda Pembuktian PARA PIHAK dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2025 The case is handled by Pelindo Regional 3 Internal Legal Team. Handling Results: • A follow-up hearing with the PARTIES' Presentation of Evidence was held on December 23, 2025	Perusahaan kehilangan aset yang dikelola. The company lost assets under its management.
Penanganan Perkara dilakukan Tim Hukum Internal Pelindo Regional 3 dengan Tim JPN pada Kejaksaan Cabang Tanjung Emas Semarang Hasil Penanganan : 1. Tingkat PN : Menyatakan Gugatan Dikabulkan Seluruhnya, menyatakan Besi adalah milik PT Pelindo (Pelindo Menang) 2. Tingkat PT : Menguatkan Putusan PN (Pelindo Menang) 3. Tingkat Kasasi : Dalam Proses Kasasi (Menunggu Putusan Kasasi) The case is handled by Internal Legal Team of Pelindo Regional 3, along with the National Prosecutor's Office Team at Tanjung Emas Semarang Branch of the Prosecutor's Office. Results: 1. District Court Level: Declared the Lawsuit Granted in Full, declaring the iron owned by PT Pelindo (Pelindo Wins). 2. High Court Level: Affirmed the District Court Decision (Pelindo Wins). 3. Cassation Level: In the Cassation Process (Awaiting the Cassation Decision).	Perushaan kehilangan obyek sengketa. The company lost the object of the dispute.

Tabel Perkara Hukum yang Dihadapi Perusahaan
Legal Cases Faced by the Company

No	Register, Locus Perkara dan Para Pihak Register, Case Locus and Parties	Pokok Perkara / Gugatan Subject Matter/Lawsuit
14	Pengadilan Negeri Semarang Nomor Perkara 249/Pdt.G/2023/PN.Smg Locus Pelabuhan Semarang Para Pihak : 1. Penggugat : PT Applicat Nusantara 2. Tergugat : PT Lamicitra 3. Turut Tergugat : PT Pelindo Semarang District Court Case Number 249/Pdt.G/2023/PN.Smg Location: Semarang Port Parties: 1. Plaintiff: PT Applicat Nusantara 2. Defendant: PT Lamicitra 3. Co-Defendant: PT Pelindo	Gugatan diajukan oleh PT Applicat kepada PT Lamicitra dikarenakan PT Applicat sebagai tenant di wilayah Kawasan Industri Tanjung Emas yang dikelola PT Lampicitra terkena banjir bandang dan rob, sehingga mengakibatkan kerugian. PT Pelindo hanya sebatar Turut Tergugat dalam perkara ini dan tidak ada dampak materiil kepada PT Pelindo. PT Applicat filed a lawsuit against PT Lamicitra because PT Applicat, as a tenant in Tanjung Emas Industrial Estate managed by PT Lampicitra, was affected by flash floods and tidal flooding, resulting in losses. PT Pelindo is only a Co-Defendant in this case, and there is no material impact on PT Pelindo.
15	Pengadilan Negeri Kupang Nomor Register Perkara 81/Pdt.G/2024/PN.KPG Locus Pelabuhan Tenau Kupang Para Pihak : 1. Penggugat : Ahli Waris S.Z Bokotei 2. Tergugat : PT Pelindo Kupang District Court Case Number 81/Pdt.G/2024/PN.KPG Location: Tenau Port, Kupang Parties: 1. Plaintiff: Heirs of S.Z. Bokotei 2. Defendant: PT Pelindo	Klaim Tanah seluas 2 Hektar Are di HPL Milik PT Pelindo oleh Ahli Waris S.Z Bokotei Claim of 2 hectares of land in the HPL owned by PT Pelindo by the Heirs of S.Z. Bokotei
16	Pengadilan Negeri Kupang Nomor Register Perkara 154/PDT/2025/PT KPG Jo. 59/Pdt.G/2025/PN.KPG Locus Pelabuhan Tenau Kupang Para Pihak : 1. Penggugat : Siti Amina Ndoen 2. Tergugat : PT Pelindo 3. Turut Tergugat : Notaris Heny Jumiali Tanoni, S.H. Kupang District Court Case Number 154/PDT/2025/PT KPG Jo. 59/Pdt.G/2025/PN.KPG Location: Tenau Port, Kupang Parties: 1. Plaintiff: Siti Amina Ndoen 2. Defendant: PT Pelindo 3. Co-Defendant: Notary Public Heny Jumiali Tanoni, S.H.	PT Pelindo cabang tenau kupang dinilai melakukan perbuatan melawan hukum oleh Siti Amina Ndoen selaku Pensiunan Pelindo terkait Jual Beli Rumah/Pengoperan Hak Bangunan Rumah tinggal seluas 50 M diatas tanah seluas 235 m2 yang dahulunya terletak di Kabupaten daerah Tingkat II Kupang, Wilayah Tenau, Kecamatan Kupang Barat Kelurahan/Desa Alak, Jalan Yos Sudarso Nomor 5 dan sekarang beralamat di Jalan Yos Sudarso, RT 016/RW 005, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur dan telah terjadi pengoperan hak atas nama Siti Aminah Ndoen PT Pelindo Tenau Kupang branch was deemed to have committed an unlawful act by Siti Amina Ndoen as a Pelindo Retiree regarding the Sale and Purchase of a House/Transfer of Building Rights for a 50 M2 residential house on 235 m2 of land which was previously located in the Kupang Regency Level II region, Tenau Region, West Kupang District, Alak Village/Village, Jalan Yos Sudarso Number 5 and is now located at Jalan Yos Sudarso, RT 016/RW 005, Alak Village, Alak District, Kupang City, East Nusa Tenggara Province and there has been a transfer of rights in the name of Siti Aminah Ndoen
17	Pengadilan Negeri Kupang Nomor Register Perkara 61/Pdt.G/2025/PN.KPG Locus Pelabuhan Tenau Kupang Para Pihak : 1. Penggugat : Johanis Laka Taniwo 2. Tergugat : PT Pelindo 3. Turut Tergugat : Notaris Heny Jumiali Tanoni, S.H. Kupang District Court Case Registration Number 61/Pdt.G/2025/PN.KPG Location: Tenau Port, Kupang Parties: 1. Plaintiff: Johanis Laka Taniwo 2. Defendant: PT Pelindo 3. Co-Defendant: Notary Public Heny Jumiali Tanoni, S.H.	PT Pelindo cabang tenau kupang dinilai melakukan perbuatan melawan hukum oleh Johanis Laka Taniwo selaku anak kandung dari Pensiunan Pelindo terkait Jual Beli Rumah/Pengoperan Hak Bangunan Rumah tinggal seluas 50 M diatas tanah seluas 270,25 m2 yang dahulunya terletak di Kabupaten daerah Tingkat II Kupang, Wilayah Tenau, Kecamatan Kupang Barat Kelurahan/Desa Alak, Jalan Yos Sudarso Nomor 5 dan sekarang beralamat di Jalan Yos Sudarso, RT 016/RW 005, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur dan telah terjadi pengoperan hak atas nama Rafael Taniwo selaku ayah Penggugat. PT Pelindo Tenau Kupang branch is considered to have committed an unlawful act by Johanis Laka Taniwo as the biological son of a Pelindo pensioner regarding the Sale and Purchase of a House/Transfer of Building Rights for a 50 M2 residential house on 270.25 m2 of land which was previously located in the Kupang Regency Level II region, Tenau Region, West Kupang District, Alak Village/Village, Jalan Yos Sudarso Number 5 and is now located at Jalan Yos Sudarso, RT 016/RW 005, Alak Village, Alak District, Kupang City, East Nusa Tenggara Province and there has been a transfer of rights in the name of Rafael Taniwo as the Plaintiff's father.

Tabel Perkara Hukum yang Dihadapi Perusahaan
Legal Cases Faced by the Company

Status Penyelesaian, Risiko, Nilai Gugatan Settlement Status, Risk, Lawsuit Amount	**Pengaruhnya terhadap kondisi Perusahaan** Impact on the Company's Condition
Penanganan Perkara dilakukan Tim Hukum Internal Pelindo Regional 3. Hasil Penanganan : 1. Tingkat PN : Gugatan Ditolak, PT Applicat wajib membayar denda ke PT Lamicitra karena wanprestasi pembayaran kawasan industry. 2. Tingkat PT : Menolak Banding PT Applicat 3. Tingkat Kasasi : Dalam Proses Kasasi (Menunggu Putusan Kasasi) The case is handled by Internal Legal Team of Pelindo Regional 3. Results: 1. District Court Level: Lawsuit Rejected, PT Applicat is required to pay a fine to PT Lamicitra for default on the industrial area payment. 2. High Court Level: Rejected PT Applicat's Appeal. 3. Cassation Level: In the Cassation Process (Awaiting the Cassation Decision).	-
Penanganan Perkara dilakukan Tim Hukum Internal Pelindo Regional 3 dan JPN Kejati NTT, yaitu : 1. Tingkat PN: Mengabulkan gugatan Penggugat Sebagian, menyatakan PT Pelindo untuk membayar kerugian materiil Penggugat (Pelindo Kalah) 2. Tingkat PT: Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Pelindo Menang) 3. Tingkat Kasasi: Dalam Proses Kasasi (Menunggu Putusan Kasasi) The case is handled by Internal Legal Team of Pelindo Regional 3 and East Nusa Tenggara High Prosecutor's Office, as follows: 1. District Court Level: Partially granted the Plaintiff's claim, ordering PT Pelindo to pay the Plaintiff's material losses (Pelindo lost). 2. High Court Level: Declared the Plaintiff's claim inadmissible (Pelindo won). 3. Cassation Level: In the cassation process (awaiting the cassation decision).	Perusahaan kehilangan aset yang dikelola. The company lost assets under its management.
Penanganan Perkara dilakukan Tim Hukum Internal Pelindo Regional 3. Hasil Penanganan : 1. Tingkat PN: Putusan dibacakan pada tanggal 22 Oktober 2025, menyatakan Gugatan tidak dapat diterima, (Pelindo Menang) 2. Tingkat PT: Menyatakan Gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Tidak Dapat Diterima (Niets Onvankelijske Verklaards) pada tanggal 11 Desember 2025. 3. Tingkat Kasasi: Penggugat/Pembanding mengajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 16 Desember 2025. The case is handled by Internal Legal Team of Pelindo Regional 3. Results: 1. District Court Level: Decision pronounced on October 22, 2025, declaring the claim inadmissible (Pelindo won). 2. High Court Level: Declared the original claim of the Plaintiff/Reconventional Defendant inadmissible (Niets Onvankelijske Verklaards) on December 11, 2025. 3. Cassation Level: Plaintiff/Appellant filed a petition. Cassation on December 16, 2025.	Perusahaan kehilangan aset yang dikelola. The company lost assets under its management.
Penanganan Perkara dilakukan Tim Hukum Internal Pelindo Regional 3. Hasil Penanganan : 1. Tingkat PN : Putusan dibacakan pada tanggal 03 November 2025, menyatakan Gugatan tidak dapat diterima, (Pelindo Menang) 2. Tingkat PT : Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 17 November 2025 dan PT Pelindo juga telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 24 November 2025. The case is handled by Pelindo Regional 3 Internal Legal Team. Results: 1. District Court Level: The decision was read on November 3, 2025, declaring the lawsuit inadmissible (Pelindo won). 2. High Court Level: The Plaintiff/Appellant filed an appeal on November 17, 2025, and PT Pelindo also filed a counter-appeal on November 24, 2025.	Nama baik Perushaan. The Company's reputation.

Tabel Perkara Hukum yang Dihadapi Perusahaan
Legal Cases Faced by the Company

No	Register, Locus Perkara dan Para Pihak Register, Case Locus and Parties	Pokok Perkara / Gugatan Subject Matter/Lawsuit
18	Pengadilan Negeri Kupang Nomor Register Perkara 62/Pdt.G/2025/PN.KPG Locus Pelabuhan Tenau Kupang Para Pihak : 1. Penggugat : Halena Anthoneta Velberg Ndoen, S.Pd 2. Tergugat : PT Pelindo 3. Turut Tergugat : Notaris Heny Jumiali Tanoni, S.H. Kupang District Court Case Number 62/Pdt.G/2025/PN.KPG Location: Tenau Port, Kupang Parties: 1. Plaintiff: Halena Anthoneta Velberg Ndoen, S.Pd 2. Defendant: PT Pelindo 3. Co-Defendant: Notary Public Heny Jumiali Tanoni, S.H.	PT Pelindo cabang tenau kupang dinilai melakukan perbuatan melawan hukum oleh Halena Anthoneta Velberg Ndoen, S.Pd selaku Istri Pensiunan Pelindo terkait Jual Beli Rumah/Pengoperan Hak Bangunan Rumah tinggal seluas 50 M diatas tanah seluas 235 m2 yang dahulunya terletak di Kabupaten daerah Tingkat II Kupang, Wilayah Tenau, Kecamatan Kupang Barat Kelurahan/Desa Alak, Jalan Yos Sudarso Nomor 5 dan sekarang beralamat di Jalan Yos Sudarso, RT 016/RW 005, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur dan telah terjadi pengoperan hak atas nama Jantje Velberg selaku Suami Penggugat. PT Pelindo Tenau Kupang branch is considered to have committed an unlawful act by Halena Anthoneta Velberg Ndoen, S.Pd as the wife of a Pelindo retiree related to the sale and purchase of a house/transfer of building rights for a 50 M2 residential house on a 235 m2 land previously located in Kupang Regency, Tenau Region, West Kupang District, Alak Village/Urban Village, Jalan Yos Sudarso Number 5 and now located at Jalan Yos Sudarso, RT 016/RW 005, Alak Village, Alak District, Kupang City, East Nusa Tenggara Province and there has been a transfer of rights in the name of Jantje Velberg as the plaintiff's husband.
19	Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor Register Perakara 37/Pdt.G/2022/PN.Pbu jo 102/PDT/2022/PT.PLK jo 4256K/Pdt/2023 Locus Pelabuhan Bumiharjo Para Pihak : 1. Penggugat : PT Kapuas Prima Coal 2. Tergugat : I PT Pelindo, II Bupati Kotawaringin Barat, III Camat Kumai, IV Lurah Kumai Hulu, V Misran, VI Notaris Soemarno Pangkalan Bun District Court Case Registration Number 37/Pdt.G/2022/PN.Pbu jo 102/PDT/2022/PT.PLK jo 4256K/Pdt/2023 Location: Bumiharjo Port Parties: 1. Plaintiff: PT Kapuas Prima Coal 2. Defendants: I. PT Pelindo, II. Regent of West Kotawaringin, III. Head of Kumai District, IV. Village Head of Kumai Hulu, V. Misran, VI. Notary Soemarno	Gugatan Perdata oleh PT Kapuas Prima Coal (KPC), Tbk kepada PT Pelindo selaku Tergugat I terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum atas sengketa kepemilikan tanah dengan seluas 3.029 M2/0,39 Ha yang terletak di Jalan CPO Pelabuhan Kalap, Rukun Tetangga 018, kelurahan Kumai Hulu, kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah Civil lawsuit filed by PT Kapuas Prima Coal (KPC), Tbk. against PT Pelindo, as Defendant I, regarding an unlawful act related to a dispute over land ownership covering an area of 3,029 m2/0.39 hectares located on Jalan CPO Pelabuhan Kalap, Neighborhood Association 018, Kumai Hulu Village, Kumai District, West Kotawaringin Regency, Central Kalimantan Province.
20	Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan Nomor Perkara 78/Pdt.G/2024/PN Bjm Locus Pelabuhan Banjarmasin Para Pihak : 1. Penggugat : Sdr Makmum 2. Tergugat : I PT Pelindo, II KSOP Banjarmasin Banjarmasin District Court, Case Number 78/Pdt.G/2024/PN Bjm Location: Banjarmasin Port Parties: 1. Plaintiff: Makmum 2. Defendant: I. PT Pelindo, II. KSOP Banjarmasin	PT Pelindo dan KSOP Banjarmasin dinilai melakukan wanprestasi atas pemesanan 13 Rumah Dinas untuk KSOP Banjarmasin sebagai ganti dari 13 Rumah Dinas KSOP Banjarmasin yang digunakan oleh PT Pelindo sebagai perluasan kawasan Pelabuhan. 13 Rumah Dinas baru ini tidak dapat terealisasi diantaranya dikarenakan belum adanya IMB dan peruntukan lahan bukanlah untuk Kawasan Pemukiman. PT Pelindo and KSOP Banjarmasin were found to have committed breach of contract regarding the order for 13 official residences for KSOP Banjarmasin to replace the 13 official residences used by KSOP Banjarmasin for the expansion of the port area. These 13 new official residences could not be realized due, in part, to the lack of Building Permit (IMB) and the land being designated for non-residential purposes.

Tabel Perkara Hukum yang Dihadapi Perusahaan
Legal Cases Faced by the Company

Status Penyelesaian, Risiko, Nilai Gugatan Settlement Status, Risk, Lawsuit Amount	**Pengaruhnya terhadap kondisi Perusahaan** Impact on the Company's Condition
Penanganan Perkara dilakukan Tim Hukum Internal Pelindo Regional 3. Hasil Penanganan : 1. Tingkat PN : Putusan dibacakan pada tanggal 8 Desember 2025, menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (Pelindo Menang) 2. Tingkat PT : Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Desember 2025. The case is handled by Pelindo Regional 3 Internal Legal Team. Results: 1. District Court Level: The decision was read on December 8, 2025, declaring the lawsuit inadmissible (Pelindo won). 2. High Court Level: The Plaintiff/Appellant filed an appeal on December 18, 2025.	Nama baik Perushaan. The Company's reputation.
Penanganan Perkara dilakukan Tim Hukum Internal Pelindo Regional 3 Hasil Penanganan : 1. Tingkat PN : Menyatakan PT Pelindo melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Tanah Obyek Sengketa adalah Milik PT KPC (Pelindo Kalah) 2. Tingkat PT : Menyatakan Tanah HPL adalah milik PT Pelindo, menghukum PT KPC mengambalikan tanah kepada PT Pelindo (Pelindo Menang). 3. Tingkat Kasasi : Menolak Kasasi PT KPC (Pelindo menang) 4. Tingkat PK : Menolak permohonan PK dari PT KPC (Pelindo menang) 5. Terhadap progress Eksekusi yang seyogyanya akan dilaksanakan tanggal 25 September 2025 ditunda, karena ada upaya hukum perlawanan dari PT KPC dan Pihak ke-3 (Padli Noor). The case is handled by Pelindo Regional 3 Internal Legal Team. Results: 1. District Court Level: Declared that PT Pelindo had committed an unlawful act and that the disputed land belonged to PT KPC (Pelindo lost). 2. High Court Level: Declared that the HPL land belonged to PT Pelindo, ordering PT KPC to return the land to PT Pelindo (Pelindo won). 3. Cassation Level: Rejected PT KPC's appeal (Pelindo won). 4. PK Level: Rejected PT KPC's PK request (Pelindo won). 5. The execution progress, which was scheduled for September 25, 2025, was postponed due to legal objections from PT KPC and a third party (Padli Noor).	Perusahaan kehilangan aset yang dikelola. The company lost assets under its management.
Penanganan Perkara dilakukan Tim Hukum Internal Pelindo Regional 3 dan saat ini masih dalam proses di PN Banjarmasin, antara lain : 1. Tingkat PN : Mengabulkan gugatan Penggugat Sebagian, menyatakan PT Pelindo untuk membayar kerugian materiil berupa nilai tagihan termin I Penggugat (Pelindo Kalah). 2. Tingkat PT : Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Pelindo Menang) 3. Bahwa PN Banjarmasin telah menetapkan Incracht melalui Surat Keterangan Nomor: 1361/PAN. PN.W15-U1/HK2/IX/2025 tanggal 15 September 2025. The case is being handled by Pelindo Regional 3 Internal Legal Team and is currently being processed at Banjarmasin District Court. As follows: 1. District Court Level: Partially grants the Plaintiff's claim, ordering PT Pelindo to pay material damages in the form of the Plaintiff's first installment bill (Pelindo Loses). 2. High Court Level: Declares the Plaintiff's claim inadmissible (Pelindo Wins). 3. Banjarmasin District Court has declared an incracht through Statement Letter Number: 1361/PAN. PN.W15-U1/HK2/IX/2025 dated September 15, 2025.	Perushaan kehilangan aset yang dikelola. The company lost assets under its management.

Tabel Perkara Hukum yang Dihadapi Perusahaan
Legal Cases Faced by the Company

No	Register, Locus Perkara dan Para Pihak Register, Case Locus and Parties	Pokok Perkara / Gugatan Subject Matter/Lawsuit
21	Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor Register Perkara 53/Pdt.Bth/2025/PN.Pbu Locus Pelabuhan Bumiharjo Para Pihak : 1. Penggugat : PT Kapuas Prima Coal 2. Tergugat : PT Pelindo Pangkalan Bun District Court Case Number 53/Pdt.Bth/2025/PN.Pbu Locus Bumiharjo Port Parties: 1. Plaintiff: PT Kapuas Prima Coal 2. Defendant: PT Pelindo	Upaya hukum perlawanan melalui PN Pangkalan Bun yang diajukan oleh PT Kapuas Prima Coal (KPC) yaitu menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 27 Oktober 2022 perkara Nomor : 37/PDT.G/2022/PN.PBU Jo Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tertanggal 19 Desember 2022 nomor no : 102/PDT/2022/PT.PLK, Jo Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 21 Desember 2023 nomor 4256 K/Pdt/2023 tidak dapat dieksekusi / Nonexecutable dan membatalkan eksekusi yang akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sepanjang meliputi objek tanah/obyek eksekusi tersebut. PT Kapuas Prima Coal (KPC) filed a legal opposition through Pangkalan Bun District Court, declaring Pangkalan Bun District Court Decision dated October 27, 2022, Case Number: 37/PDT.G/2022/PN.PBU in conjunction with Palangkaraya High Court Decision dated December 19, 2022, Number: 102/PDT/2022/PT.PLK, in conjunction with the Supreme Court Decision dated December 21, 2023, Number 4256 K/Pdt/2023, non-executable and canceling the execution to be carried out by Pangkalan Bun District Court, insofar as it relates to the land object/the execution object
22	Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor Register Perkara 56/Pdt.Bth/2025/PN.Pbu Locus Pelabuhan Bumiharjo Para Pihak : 1. Penggugat : Padli Noor 2. Tergugat : PT Pelindo Pangkalan Bun District Court Case Number 56/Pdt.Bth/2025/PN.Pbu Location: Bumiharjo Port Parties: 1. Plaintiff: Padli Noor 2. Defendant: PT Pelindo	Upaya hukum perlawanan melalui PN Pangkalan Bun yang diajukan oleh Pihak Ie-3 dalam hal ini Padli Noor yaitu menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 27 Oktober 2022 perkara Nomor: 37/PDT.G/2022/PN.PBU Jo Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tertanggal 19 Desember 2022 Nomor: 102/PDT/2022/PT.PLK, Jo Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 21 Desember 2023 Nomor: 4256 K/Pdt/2023 tidak dapat dieksekusi/Non executable dan membatalkan eksekusi yang akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sepanjang meliputi objek tanah/obyek eksekusi tersebut A legal opposition filed with Pangkalan Bun District Court by a third party, namely Padli Noor, seeks a declaration that Pangkalan Bun District Court Decision dated October 27, 2022, Case Number 37/PDT.G/2022/PN.PBU, in conjunction with Palangkaraya High Court Decision dated December 19, 2022, Number 102/PDT/2022/PT.PLK, and the Supreme Court of the Republic of Indonesia Decision dated December 21, 2023, Number 4256 K/Pdt/2023, are non-executable, and requests the annulment of the execution to be carried out by Pangkalan Bun District Court insofar as it relates to the land object/the execution object.

Tabel Perkara Hukum yang Dihadapi Perusahaan
Legal Cases Faced by the Company

Status Penyelesaian, Risiko, Nilai Gugatan Settlement Status, Risk, Lawsuit Amount	**Pengaruhnya terhadap kondisi Perusahaan** Impact on the Company's Condition
Penanganan Perkara dilakukan Tim Hukum Internal Pelindo Regional 3. Hasil Penanganan : • Tingkat PN : Putusan dibacakan pada tanggal 27 November 2025, menyatakan Menolak Bantahan Pembantah untuk seluruhnya, (Pelindo Menang) The case is handled by Pelindo Regional 3 Internal Legal Team. Results: • District Court Level: The decision was read on November 27, 2025, rejecting the Objector's objections in their entirety (Pelindo Wins).	Perusahaan kehilangan aset yang dikelola The company lost assets under its management.
Penanganan Perkara dilakukan Tim Hukum Internal Pelindo Regional 3. Hasil Penanganan : 1. Agenda Putusan Sela dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2025 The case is being handled by Pelindo Regional 3 Internal Legal Team. Results of Handling: 1. The Interim Decision Agenda will be held on December 29, 2025.	Perusahaan kehilangan aset yang dikelola The company lost assets under its management.

Tabel Perkara Hukum yang Dihadapi Perusahaan
Legal Cases Faced by the Company

No	Register, Locus Perkara dan Para Pihak Register, Case Locus and Parties	Pokok Perkara / Gugatan Subject Matter/Lawsuit
23	Nomor Register : 1. Pengadilan Negeri : 207/Pdt.G/2006/PN.Mks 2. Pengadilan Tinggi : 293/PDT/2008/PT.MKS 3. Kasasi : 2919 K/Pdt/2009 4. Peninjauan Kembali I : 321 PK/Pdt./2012 5. Peninjauan Kembali II : 71/PK/PDT/2024 Locus: Pelabuhan Makassar PT Pelindo, HPL No.1/1993 Para Pihak : 1. Penggugat I :Ince Baharuddin, dkk 2. Penggugat II : Ince Rahmawati 3. Penggugat Intervensi I : A. Parenrengi 4. Penggugat Intervensi II : Tally Dg Galla 5. Tergugat I : PT Pelindo 6. Tergugat II : PT Pertamina 7. Tergugat III : Pemkot Makassar 8. Tergugat IV : BPN Registration Number: 1. District Court: 207/Pdt.G/2006/PN.Mks 2. High Court: 293/PDT/2008/PT.MKS 3. Cassation: 2919 K/Pdt/2009 4. First Judicial Review: 321 PK/Pdt./2012 5. Second Judicial Review: 71/PK/PDT/2024 Location: Makassar Port, PT Pelindo, HPL No. 1/1993 Parties: 1. First Plaintiff: Ince Baharuddin, et al. 2. Second Plaintiff: Ince Rahmawati 3. First Intervening Plaintiff: A. Parenrengi 4. Second Intervening Plaintiff: Tally Dg Galla 5. First Defendant: PT Pelindo 6. Second Defendant: PT Pertamina 7. Third Defendant: Makassar City Government 8. Defendant IV: National Land Agency	Para Penggugat mengklaim bahwa tanah yang diklaim adalah tanah adat milik orang tua mereka berdasarkan persil No. 2 D.II & Kohir No. 57 C.1 tahun 1942. The Plaintiffs claim that the land claimed is customary land belonging to their parents based on persil No. 2 D.II & Kohir No. 57 C.1 of 1942.

Tabel Perkara Hukum yang Dihadapi Perusahaan
Legal Cases Faced by the Company

Status Penyelesaian, Risiko, Nilai Gugatan Settlement Status, Risk, Lawsuit Amount	**Pengaruhnya terhadap kondisi Perusahaan** Impact on the Company's Condition
Penanganan Perkara dilakukan Tim Hukum Internal Pelindo Regional 4 Hasil Penanganan : 1. Tingkat PN : Menyatakan Gugatan para Penggugat Tidak Dapat diterima 2. Tingkat PT : Menguatkan Putusan PN 3. Tingkat Kasasi : posisi Perseroan Kalah dengan amar putusan 1. menyatakan Ince Baharuddin sebagai pemilik sah atas tanah sengketa 2. Penerbitan HPL 1/1994 merupakan perbuatan melawan hukum 3. Sertipikat HPL Tidak sah. 4. Tingkat PK : Menolak permohonan Peninjauan Kembali Pertamina, H. Andi Parenrengi dan Pelindo IV. Saat ini Kantor Pertanahan Kota Makassar mengajukan PK 2 Di Mahkamah Agung RI. (Pelindo IV Kalah) PK II (Pertamina) nomor 71/PK/PDT/2024 tanggal 24 Januari 2024 5. PK Kedua Pertamina telah diputus dengan amar Putusan Ditolak. 6. Tim Legal HO melalui Tim Lawyer Saleh & Partnerstelah melakukan penelusuran dokumen kewarisan dan historis Simana Boetaja di instansi terkait yang dijadikan sebagai alat bukti oleh Ince Baharuddin dkk dalam persidangan perkara tersebut. 7. Terhadap perkara tersebut tidak dapat dilakukan eksekusi karena salah objek (error in objecto). 8. Ince Baharuddin dkk, melalui kuasa hukumnya H.I.P Indonesia Law Firm menyurat ke Pengadilan Negeri Makassar tanggal 29 Agustus 2025 perihal Permohonan Tindaklanjut Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Putusan 207 jo. Putusan PT 293 jo. Putusan Kasasi 2919 jo. Putusan PK jo. Putusan PK II 71. 9. PN Makassar telah memanggil Pelindo sebagai Termohon Eksekusi I atas putusan 207 jo. Putusan PT 293 jo. Putusan Kasasi 2919 jo. Putusan PK jo. Putusan PK II 71 melalui surat panggilan peneguran (Aanmaning) tanggal 24 September 2025. Aanmaning dihadiri oleh tim Hukum Pelindo Regional 4, tim Hukum Kantor Pusat, dan didampingi JPN Kejati Sulsel pada tanggal 28 Oktober 2025. Jawaban atas Aanmaning tersebut telah diserahkan JPN kepada Panitera PN Makassar.	a. Tuntutan Ganti rugi ke Pertamina selaku penyewa tanah Perseroan dari Ahli Waris Ince Kormala dapat menyebabkann penurunan kredibilitas Perseroan selaku pemilik lahan yang sah b. Penundaan pembayaran sewa oleh PT Pertamina
The case is handled by Pelindo Regional 4 Internal Legal Team. Results: 1. District Court Level: Declared the Plaintiffs' Claim Inadmissible 2. High Court Level: Affirmed the District Court Decision 3. Cassation Level: The Company lost with the following rulings: 4. Declaring Ince Baharuddin as the legal owner of the disputed land. 2. The issuance of the Land Registration Certificate (HPL) 1/1994 was an unlawful act. 5. The HPL certificate was invalid. 6. Judicial Review Level: Rejected the judicial review application of Pertamina, H. Andi Parenrengi, and Pelindo IV. Currently, the Makassar City Land Office has filed a second judicial review (PK) with the Supreme Court of the Republic of Indonesia. (Pelindo IV lost). Second judicial review (PK) (Pertamina) number 71/PK/PDT/2024 dated January 24, 2024. 7. Pertamina's second judicial review has been decided with the ruling rejected. 8. HO Legal Team, through Saleh & Partners Lawyer Team, has conducted a search of Simana Boetaja's inheritance and historical documents at relevant agencies, which were used as evidence by Ince Baharuddin et al. in the trial of the case. 9. The case cannot be executed due to an error in objecto. 10. Ince Baharuddin et al., through their attorney, H.I.P Indonesia Law Firm, wrote to Makassar District Court on August 29, 2025, regarding a Request for Follow-up Execution of Decision 207 in conjunction with High Court Decision 293 in conjunction with Cassation Decision 2919 in conjunction with PK Decision in conjunction with PK II Decision 71. 11. Makassar District Court has summoned Pelindo as the First Execution Respondent for Decision 207 in conjunction with High Court Decision 293 in conjunction with Cassation Decision 2919 in conjunction with PK Decision in conjunction with th PK II Decision 71. Decision of PK II 71 through a warning summons (Aanmaning) dated September 24, 2025. The Aanmaning was attended by Pelindo Regional 4 Legal team, Head Office Legal team, and accompanied by JPN of South Sulawesi High Prosecutor's Office on October 28, 2025. The response to the Aanmaning has been submitted by the JPN to the Clerk of Makassar District Court.	a. The claim for compensation from Ince Kormala's heirs to Pertamina, as the Company's land lessee, could undermine the Company's credibility as the legitimate landowner. b. Delay in rental payments by PT Pertamina

Tabel Perkara Hukum yang Dihadapi Perusahaan
Legal Cases Faced by the Company

No	Register, Locus Perkara dan Para Pihak Register, Case Locus and Parties	Pokok Perkara / Gugatan Subject Matter/Lawsuit
24	Nomor Register : 1. Pengadilan Negeri : 373/Pdt.G/2016/PN.Mks 2. Pengadilan Tinggi : 200/PDT/2018/PT.Mks 3. Kasasi : 3251 K/Pdt/2019 Locus: Pelabuhan Makassar PT Pelindo, HPL No. 1/1994 Cambayya Para Pihak : 1. Penggugat : PT Pelindo 2. Tergugat I : PT Sinar Makassar 3. Tergugat II : Tan Rustan 4. Tergugat III : Baso Buniyamin 5. Tergugat IV : Camat Ujung Tanah 6. Tergugat V : Lurah Cambaya 7. Tergugat VI : Kepala Kantor BPN Kota Makassar 8. Tergugat VII : Notaris/PPAT Taufik Arifin 9. Tergugat VIII : PT Afta Tehnik Mandiri Registration Number: 1. District Court: 373/Pdt.G/2016/PN.Mks 2. High Court: 200/PDT/2018/PT.Mks 3. Cassation: 3251 K/Pdt/2019 Location: Makassar Port, PT Pelindo, HPL No. 1/1994 Cambayya Parties: 1. Plaintiff: PT Pelindo 2. Defendant I: PT Sinar Makassar 3. Defendant II: Tan Rustan 4. Defendant III: Baso Buniyamin 5. Defendant IV: Ujung Tanah Sub-district Head 6. Defendant V: Cambaya Village Head 7. Defendant VI: Head of the Makassar City Land Agency 8. Defendant VII: Notary/PPAT Taufik Arifin 9. Defendant VIII: PT Afta Tehnik Mandiri	Penggugat menggugat para Tergugat melakukan PMH di atas tanah milik PT Pelindo berdasarkan Sertifikat Hak Pengelolaan No. 1 Tahun 1994 seluas 4.18 Hektar dan para Tergugat mengklaim bahwa tanah tersebut bukanlah milik PT Pelindo IV (Persero) The Plaintiff sued the Defendants for engaging in a 4.18-hectare land clearing operation on land owned by PT Pelindo IV (Persero) based on Management Rights Certificate No. 1 of 1994. The Defendants claimed that the land did not belong to PT Pelindo IV (Persero).
25	Nomor Register : 1. Pengadilan Negeri : 218/Pdt.G/2021/PN.Smr 2. Pengadilan Tinggi :96/PDT/2023/PT.Smr 3. Kasasi : 311 K/PDT/2024 4. Locus: Pelabuhan Samarinda PARA PIHAK : 1. Penggugat : Koperasi TKBM Samudera Sejahtera 2. Tergugat I : PT Pelabuhan Samudera Palaran 3. Turut Tergugat I : PT Pelindo 4. Turut Tergugat II : KSOP Samarinda 5. Turut Tergugat III : Ketua INSA 6. Turut Tergugat IV : Ketua DPC ALFI 7. Turut Tergugat V : Ketua DPC APBMI Registration Number: 1. District Court: 218/Pdt.G/2021/PN.Smr 2. High Court: 96/PDT/2023/PT.Smr 3. Cassation: 311 K/PDT/2024 4. Locus: Samarinda Port PARTIES: 1. Plaintiff: Samudera Sejahtera TKBM Cooperative 2. Defendant I: PT Pelabuhan Samudera Palaran 3. Co-Defendant I: PT Pelindo 4. Co-Defendant II: Samarinda KSOP 5. Co-Defendant III: Chairman of INSA 6. Co-Defendant IV: Chairman of ALFI Branch 7. Co-Defendant V: Chairman of APBMI Branch	Gugatan PMH oleh TKBM Komura di Pengadilan Negeri Samarinda. Penggugat menggugat terhadap Berita Acara Penetapan Upah TKBM Pelabuhan Samarinda dan Tarif Tambahan CHC (Container Handling Charge) yang dibuat tanggal 28 Juli 2017 sehingga merugikan Penggugat PMH lawsuit by TKBM Komura at Samarinda District Court. The plaintiff sued against the Minutes of Determination of TKBM Wages at Samarinda Port and Additional CHC (Container Handling Charge) Tariffs made on July 28, 2017, which caused losses to the plaintiff.

Tabel Perkara Hukum yang Dihadapi Perusahaan
Legal Cases Faced by the Company

Status Penyelesaian, Risiko, Nilai Gugatan Settlement Status, Risk, Lawsuit Amount	**Pengaruhnya terhadap kondisi Perusahaan** Impact on the Company's Condition
Penanganan Perkara dilakukan Tim Hukum Internal Pelindo Regional 4 Hasil Penanganan : 10. Tingkat PN : Menolak Gugatan Penggugat 1. Tingkat PT : Menguatkan Putusan PN 2. Tingkat Kasasi : Menguatkan Putusan sebelumnya atau Perseroan dinyatakan Kalah. The case is handled by Pelindo Regional 4 Internal Legal Team. Results: 1. District Court Level: Rejected the Plaintiff's Claim 2. High Court Level: Affirmed the District Court Decision 3. Cassation Level: Affirmed the previous decision or the Company was declared the Loser.	a. Terhadap lahan yang dikuasai oleh Penggugat dapat dimohonkan perpanjangan HGB di atasnya, karena Perseroan belum melakukan upaya atas putusan Kasasi ini; b. Efek putusan ini dapat menyebabkan, warga yang berada di atas lahan HPL Perseroan No. 1/1994 Cambaya, memohonkan hak ke BPN. a. An extension of the HGB (Land Use Rights) may be requested for the land controlled by the Plaintiff, as the Company has not yet made any efforts to address this cassation decision; b. The effect of this decision may be that residents residing on the Company's HPL land No. 1/1994 Cambaya may apply for rights to the National Land Agency (BPN).
Penanganan Perkara dilakukan Tim Hukum Internal Pelindo Regional 4 Hasil Penanganan : 1. Tingkat PN : Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian (Pelindo Kalah). 2. Tingkat PT : Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda (Perseroan Menang) 3. Tingkat Kasasi : Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi (Perseroan Menang). 4. Tingkat PK : Saat ini Pihak Penggugat telah Mengajukan upaya Peninjauan Kembali. 5. Upaya PK ditolak dengan nomor putusan 697 PK/PDT/2025. The case is handled by Pelindo Regional 4 Internal Legal Team. Results: 1. District Court Level: Granted the Plaintiff's lawsuit in part (Pelindo Lost). 2. High Court Level: Overturned Samarinda District Court Decision (The Company Won). 3. Cassation Level: Rejected the Applicant's cassation request (The Company Won). 4. Judicial Review Level: The Plaintiff has filed a judicial review. 5. The judicial review was rejected under decision number 697 PK/PDT/2025.	Nama baik Perushaan The Company's reputation

Tabel Perkara Hukum yang Dihadapi Perusahaan
Legal Cases Faced by the Company

No	Register, Locus Perkara dan Para Pihak Register, Case Locus and Parties	Pokok Perkara / Gugatan Subject Matter/Lawsuit
26	Nomor Register : 1. Pengadilan Negeri :14/Pdt.G/2023/PN.Trg 2. Pengadilan Tinggi : 3. Kasasi : 4. Peninjauan Kembali I : 5. Peninjauan Kembali II : Locus: Pelabuhan Samarinda Para Pihak : 1. Penggugat : PT Hasamin Bahar Line 2. Tergugat : PT Tunggang Parangan Kutai Kartanegara (Perseroda) 3. Turut Tergugat I : PT Pelindo 4. Turut Tergugat II : Herlin Samudera Lines Registration Number: 1. District Court: 14/Pdt.G/2023/PN.Trg 2. High Court: 3. Cassation: 4. First Judicial Review: 5. Second Judicial Review: Location: Samarinda Port Parties: 1. Plaintiff: PT Hasamin Bahar Line 2. Defendant: PT Tunggang Parangan Kutai Kartanegara (Perseroda) 3. First Co-Defendant: PT Pelindo 4. Second Co-Defendant: Herlin Samudera Lines	Gugatan Perdata dari PT Hasamin Bahar Lines di Pengadilan Negeri Tenggarong berdasarkan Nomor Register Perkara 14/Pdt.G/2023/PN.Trg Tanggal 7 Februari 2023. Penggugat mengklaim adanya wanprestasi PT Tunggang Parangan atas Perjanjian Kerjasama dengan PT Hasamin Bahar Lines Nomor 04/PK/DUT-PTP/XI/2019 dan Nomor 22/HBL-PRSD/TC/XI/2019 Tanggal 7 November 2019 tentang Pelayanan Jasa Penundaan di Bawah Jembatan Kutai Kartanegara di Wilayah Jembatan Kutai Kartanegara yang menurut penggugat bahwa tergugat melakukan wanprestasi atas perjanjian dimaksud. Perseroan sebagai Turut Tergugat I. A civil lawsuit filed by PT Hasamin Bahar Lines at Tenggarong District Court under Case Register Number 14/Pdt.G/2023/PN.Trg dated February 7, 2023. The plaintiff claims PT Tunggang Parangan has breached its contractual obligations under the Cooperation Agreement with PT Hasamin Bahar Lines, No. 04/PK/DUT-PTP/XI/2019 and No. 22/HBL-PRSD/TC/XI/2019 dated November 7, 2019, concerning Towing Services under Kutai Kartanegara Bridge in Kutai Kartanegara Bridge Area. The plaintiff claims the defendant has breached the agreement. The Company is Co-Defendant I.
27	Nomor Register : 1. Pengadilan TUN : 43/G/2009/PTUN-MDN 2. Pengadilan Tinggi TUN : 52/B/2023/PT.TUN.BJM 3. Kasasi : Locus: Pelabuhan Samarinda PARA PIHAK : 1. Penggugat : PT Pelabuhan Samudera Palaran 2. Penggugat II : PT Pelindo 3. Tergugat : Kepala KSOP Kelas II Samarinda Registration Number: 1. Administrative Court: 43/G/2009/PTUN-MDN 2. Administrative High Court: 52/B/2023/PT.TUN.BJM 3. Cassation: Location: Samarinda Port PARTIES: 1. Plaintiff: PT Pelabuhan Samudera Palaran 2. Plaintiff II: PT Pelindo 3. Defendant: Head of Samarinda Class II KSOP	Gugatan TUN yang diajukan oleh PT Pelabuhan Samudera Palaran kepada Kepala KSOP Kelas II Samarinda dengan objek sengketa Surat Keputusan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda Nomor: KU.501/I/2/KSOP.SMD-2014 tanggal, 10 Maret 2014 Tentang Tarif Ongkos Pelabuhan Pemuatan (OPP), Ongkos Pelabuhan Tujuan (OPT). The administrative lawsuit filed by PT Pelabuhan Samudera Palaran against the Head of Samarinda Class II KSOP is disputed over the Decree of Samarinda Class II Harbormaster and Port Authority Office Number: KU.501/I/2/KSOP.SMD-2014 dated March 10, 2014, concerning Port of Loading (OPP) and Port of Destination (OPT) Tariffs.

Tabel Perkara Hukum yang Dihadapi Perusahaan
Legal Cases Faced by the Company

Status Penyelesaian, Risiko, Nilai Gugatan Settlement Status, Risk, Lawsuit Amount	**Pengaruhnya terhadap kondisi Perusahaan** Impact on the Company's Condition
Penanganan Perkara dilakukan Tim Hukum Internal Pelindo Regional 4 Hasil Penanganan : 1. Tingkat PN : Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian (Pelindo Kalah). 2. Tingkat PT : Menguatkan Putusan PN (Pelindo Kalah) 3. Tingkat Kasasi : Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi PT Tunggang Parangan Kutai Kartanegara (Perseroda) dan dituntut untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.5.343.315.823,- kepada PT Hasamin Bahar Lines). (Pelindo Kalah) 4. Pada Aanmaning ke 4 telah diputuskan bahwa PT Tunggang Parangan tetap membayar ganti rugi sebesar Rp.5.343.315.823,- kepada PT Hasamin Bahar Lines. The case is handled by Pelindo Regional 4 Internal Legal Team. Results: 1. District Court Level: Partially granted the Plaintiff's claim (Pelindo lost). 2. High Court Level: Affirmed the District Court Decision (Pelindo Lost) 3. Cassation Level: Rejected the Cassation Request from the Cassation Applicant, PT Tunggang Parangan Kutai Kartanegara (Perseroda), and ordered PT Hasamin Bahar Lines to pay compensation of Rp5,343,315,823. (Pelindo Lost) 4. At the 4th Aanmaning, it was decided that PT Tunggang Parangan would still pay compensation of Rp5,343,315,823.	-
Penanganan Perkara dilakukan Tim Hukum Internal Pelindo Regional 4 Hasil Penanganan : 1. Tingkat PN: Perkara telah putus di PTUN dengan menyatakan gugatan Penggugat dan Penggugat II tidak dapat diterima. PT PSP dan PT Pelindo telah mengajukan banding dan telah menyerahkan memori banding tersebut ke Pengadilan Tingggi TUN di Banjarmasin pada tanggal 14 Juli 2023. 2. Tingkat PT: Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TUN Banjarmasin telah memutus perkara Nomor: 52/B/2023/PT.TUN.BJM tanggal 19 September 2023 dengan amar putusan yang pada intinya Menolak permohonan Banding dari pemohon Banding (PT PSP). 3. Tingkat Kasasi: Perkara telah diputus tingkat Kasasi dengan amar putusan menolak permohonan Kasasi PT Pelabuhan Samudera Palaran (PT PSP) The case is handled by Pelindo Regional 4 Internal Legal Team. Results: 1. District Court Level: The case was decided by the State Administrative Court, declaring the Plaintiff and Plaintiff II's claims inadmissible. PT PSP and PT Pelindo have filed appeals and submitted their appeal briefs to Banjarmasin High Court of Administrative Court on July 14, 2023. 2. High Court Level: The Panel of Judges of Banjarmasin High Court of Administrative Court ruled on case number 52/B/2023/PT.TUN.BJM on September 19, 2023, with a decision essentially rejecting the appeal filed by the Appellant (PT PSP). 3. Cassation Level: The case was decided by the Cassation Level, rejecting the appeal filed by PT Pelabuhan Samudera Palaran (PT PSP).	-

Tabel Perkara Hukum yang Dihadapi Perusahaan
Legal Cases Faced by the Company

No	Register, Locus Perkara dan Para Pihak Register, Case Locus and Parties	Pokok Perkara / Gugatan Subject Matter/Lawsuit
28	Pengadilan Negeri Ambon Nomor Register Perkara 8/Pdt.G/2025/PN.Amb Locus Rumah Dinas Pelindo Reg 4 Cab. Ambon PARA PIHAK : 1. Penggugat : Julianus Wattimena 2. Penggugat Intervensi : Rycko Weynner Alfons 3. Tergugat I : Pimpinan PT Pelindo Cabang Ambon 4. Tergugat II : Pimpinan Pusat PT Pelindo Jakarta Ambon District Court Case Registration Number 8/Pdt.G/2025/PN.Amb Location: Pelindo Official Residence, Reg. 4, Ambon Branch PARTIES: 1. Plaintiff: Julianus Wattimena 2. Intervening Plaintiff: Rycko Weynner Alfons 3. Defendant I: Head of PT Pelindo Ambon Branch 4. Defendant II: Head of PT Pelindo Jakarta	Gugatan dengan nomor register perkara : 8/Pdt.G/2025/PN.Amb yang mengklaim tanah seluas 1.710 m2 yang berada di atas HGB nomor 176/Benteng atas nama Perseroan dengan Penggugat Julianus Wattimena dan Tergugat I Pimpinan PT Pelindo Cabang Ambon, Tergugat II adalah Pimpinan Pusat PT Pelindo Jakarta. Adapun Penggugat Intervensi Rycko Weynner Alfons, ahli waris almarhum Jacobus Abner Alfons, keturunan lurus dari almarhum Jozias Alfons Lawsuit with case registration number 8/Pdt.G/2025/PN.Amb claims 1,710 m2 of land located on HGB (right to build) number 176/Benteng in the name of the Company. Plaintiff Julianus Wattimena and Defendant I are the Head of PT Pelindo Ambon Branch, and Defendant II is the Head of PT Pelindo Jakarta. As for the Intervening Plaintiff Rycko Weynner Alfons, heir of the late Jacobus Abner Alfons, a direct descendant of the late Jozias Alfons

Tabel Perkara Hukum yang Dihadapi Perusahaan
Legal Cases Faced by the Company

Status Penyelesaian, Risiko, Nilai Gugatan Settlement Status, Risk, Lawsuit Amount	**Pengaruhnya terhadap kondisi Perusahaan** Impact on the Company's Condition
Penanganan Perkara dilakukan Tim Hukum Internal Pelindo Regional 4 didampingi oleh JPN Kejati Maluku Hasil Penanganan : Tingkat PN : 1. Sidang pertama tanggal 22 Januari 2025, pihak Perseroan selaku tergugat I dan II meminta untuk diundur karena Surat Kuasa belum ada. 2. Tanggal 20 Februari 2025 Penggugat mengajukan resume Mediasi kepada Hakim Mediator namun Perseroan selaku Tergugat tidak dapat memenuhi permintaan Penggugat. 3. Tanggal 6 Maret 2025 agenda sidang Pembacaan Gugatan. 4. Tanggal 15 Mei 2025 agenda sidang Putusan Sela atas Gugatan Intervensi. 5. Tanggal 23 Mei 2025 agenda sidang Replik Penggugat terhadap Jawaban dari Tergugat. 6. Tanggal 12 Juni 2025 agenda sidang Duplik pada Tergugat atas Replik Penggugat. 7. Tanggal 17 Juli 2025 agenda sidang Pembuktian Penggugat. 8. Tanggal 07 Agustus 2025 agenda sidang Pembuktian Para Tergugat. 9. Tanggal 21 Agustus 2025 agenda sidang Pembuktian Surat Tergugat Intervensi. 10. Tanggal 09 September 2025 agenda sidang Pemeriksaan Objek Sengketa (PS). Dalam siding PS, Penggugat menunjuk objek yang berbeda tidak sesuai dengan objek pada Gugatan. 11. Tanggal 23 September 2025 dan 16 Oktober 2025 agenda sidang Pemeriksaan Saksi Penggugat. 12. Tanggal 23 Oktober 2025 agenda sidang Pemeriksaan Saksi Tergugat (Pelindo). 13. Tanggal 13 November 2025 agenda sidang lanjutan Pemeriksaan Saksi Tergugat (Pelindo). 14. Selanjutnya sidang lanjutan Pemeriksaan Saksi Tergugat, Pelindo akan menghadirkan Pensiunan yang paham terkait objek perkara, sedang menunggu konfirmasi (Bpk. H. Chairil Anwar) untuk berkenan hadir menjadi Saksi di persidangan.	Apabila Pelindo kalah, maka Perseroan berpotensi kehilangan aset.
The case is handled by Pelindo Regional 4 Internal Legal Team, assisted by Maluku High Prosecutor's Office (Kejati Maluku). Results: District Court Level: 1. The first hearing took place on January 22, 2025. The Company, as Defendant I and II, requested a postponement due to the absence of a Power of Attorney. 2. On February 20, 2025, the Plaintiff submitted a Mediation Summary to the Mediator Judge, but the Company, as Defendant, was unable to comply with the Plaintiff's request. 3. The hearing scheduled for March 6, 2025, was for the Reading of the Lawsuit. 4. The hearing scheduled for May 15, 2025, was for the Interlocutory Decision on the Intervention Lawsuit. 5. The hearing scheduled for May 23, 2025, was for the Plaintiff's Reply to the Defendant's Response. 6. The hearing scheduled for June 12, 2025, was for the Defendant's Duplicate to the Plaintiff's Reply. 7. July 17, 2025, the Plaintiff's Evidence Session is scheduled. 8. August 7, 2025, the Defendants' Evidence Session is scheduled. 9. August 21, 2025, the Defendant's Evidence Session is scheduled. 10. September 9, 2025, the Object of Dispute (PS) Examination Session is scheduled. In the PS session, the Plaintiff identified a different object that does not align with the object of the lawsuit. 11. September 23, 2025, and October 16, 2025, the Plaintiff's Witness Examination Session is scheduled. 12. October 23, 2025, the Defendant's (Pelindo) Witness Examination Session is scheduled. 13. November 13, 2025, the Defendant's (Pelindo) Witness Examination Session is scheduled. 14. Next, in the follow-up hearing of the Defendant's Witness Examination, Pelindo will present a retiree who understands the object of the case, who is currently awaiting confirmation (H. Chairil Anwar) to be willing to attend as a witness at the trial.	If Pelindo loses, the Company has the potential to lose assets.

Tabel Perkara Hukum yang Dihadapi Perusahaan
Legal Cases Faced by the Company

No	Register, Locus Perkara dan Para Pihak Register, Case Locus and Parties	Pokok Perkara / Gugatan Subject Matter/Lawsuit
29	Pengadilan Negeri Bitung 214/Pdt.G/2025/PN.Bit Locus: sebagian tanah HPL No.1 Tahun 1995 Bitung Timur - Cabang Bitung PARA PIHAK : 1. Penggugat : Pelindo Regional 4 Bitung 2. Tergugat : Julian Alexander Maramis 3. Tergugat I : Freddy Everhart D L Maramis 4. Tergugat II : Grace Diana Y Maramis 5. Tergugat III : Abdul Karim Saleh 6. Tergugat IV : Anwar Sulaiman	Pelindo melaporkan Julian Alex Maramis karena menggunakan / menguasai Tanah Pelindo seluas 810 m² yang terletak di Jl. Ds Sumolang, Kota Bitung tanpa adanya persetujuan dari Pelindo. Pelindo selaku Penggugat melakukan upaya hukum karena memanfaatkan sebagian Tanah Pelindo berdasarkan HPL 1/Bitung Timur.
	Bitung District Court 214/Pdt.G/2025/PN.Bit Locus: Part of the Land with HPL No. 1 Year 1995, East Bitung - Bitung Branch PARTIES: 1. Plaintiff: Pelindo Regional 4 Bitung 2. Defendant: Julian Alexander Maramis 3. Defendant I: Freddy Everhart D L Maramis 4. Defendant II: Grace Diana Y Maramis 5. Defendant III: Abdul Karim Saleh 6. Defendant IV: Anwar Sulaiman	Pelindo filed a lawsuit against Julian Alex Maramis for using/possessing 810 m² of Pelindo land located on Jl. Ds Sumolang, Bitung City, without Pelindo's consent. Pelindo, as the Plaintiff, has taken legal action for using part of Pelindo's land under HPL 1/East Bitung.

Tabel Perkara Hukum yang Dihadapi Perusahaan
Legal Cases Faced by the Company

Status Penyelesaian, Risiko, Nilai Gugatan Settlement Status, Risk, Lawsuit Amount	**Pengaruhnya terhadap kondisi Perusahaan** Impact on the Company's Condition
Penanganan Perkara dilakukan Tim Hukum Internal Pelindo Regional 4 didampingi oleh JPN Kejari Bitung 1. Terhadap permasalahan ini, Cabang Bitung mencoba melakukan upaya persuasif ke pihak Alex Maramis dengan menerbitkan surat permintaan pembahasan persewaan lahan HPL Pelindo dengan konsep be to be. 2. Namun tidak adanya itikad baik dari pihak Alex Maramis, maka Pelindo memohon pendampingan hukum kepada Jaksa Pengacara Negara Kejari Bitung untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bitung. 3. Pada tanggal 11 November 2025 gugatan telah terdaftar di Pengadilan Negeri Bitung. 4. Sidang pertama pada tanggal 26 November 2025 dengan agenda Mediasi Para Tergugat, namun Para Tergugat tidak hadir pada sidang tersebut. 5. Selanjutnya kami sampaikan bahwa gugatan perkara nomor 214/Pdt.G/2025/PN.Bit, akan dicabut karena dalam tuntutan (petitum) belum terakomodir point agar para tergugat mengosongkan objek perkara, sehingga gugatan kami cabut kemudian akan ditambahkan hal – hal yang belum terakomodir pada tuntutan (petitum) gugatan dan kemudian segera dimasukan kembali gugatan di Pengadilan Negeri Bitung pada kesempatan pertama. 6. Draft finalisasi gugatan yang telah mengakomodir hal – hal yang belum ada pada petitum telah dikirimkan ke Tim Legal Regional 4 dan diteruskan ke Manager Penanganan Perkara Kantor Pusat. The case is handled by Pelindo Regional 4 Internal Legal Team, assisted by Bitung District Attorney's Office. 1. Regarding this issue, Bitung Branch attempted to persuade Alex Maramis by issuing a letter requesting a discussion regarding the lease of Pelindo's HPL land under a "be-to-be" concept. 2. However, due to Alex Maramis's lack of good faith, Pelindo requested legal assistance from Bitung District Attorney to file a lawsuit with Bitung District Court. 3. The lawsuit was registered with the Bitung District Court on November 11, 2025. 4. The first hearing was held on November 26, 2025, with the agenda being Mediation between the Defendants, but the Defendants did not attend. 5. We further inform you that the lawsuit, case number 214/Pdt.G/2025/PN.Bit, will be withdrawn because the demand (petitum) has not yet accommodated the point requiring the defendants to vacate the object of the case. Therefore, we are withdrawing the lawsuit and will then add matters not yet accommodated in the demand (petitum) of the lawsuit and then immediately resubmit the lawsuit to Bitung District Court at the earliest opportunity. 6. The final draft of the lawsuit, which has accommodated matters not yet included in the petitum, has been sent to the Regional Legal Team 4 and forwarded to the Head Office Case Handling Manager.	Apabila Pelindo kalah, maka Perseroan berpotensi kehilangan aset If Pelindo loses, the Company has the potential to lose assets.

PERMASALAHAN HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG SEDANG MENJABAT

LEGAL ISSUES CURRENTLY FACED BY BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS IN OFFICE

Pokok Perkara / Gugatan Issue / Lawsuit	**Status Penyelesaian** Settlement Status	**Pengaruhnya terhadap kondisi Perusahaan** Impact on the Company's Condition
Pada akhir tahun 2025, terdapat permasalahan hukum yang sedang dihadapi Direktur yang sedang menjabat. permasalahan hukum dimaksud terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pengadaan 2 (dua) Unit Kapal Tunda Kapasitas 2 x 1.800 untuk Cabang Dumai antara PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dengan PT Dok Perkapalan Surabaya (Persero) dengan kontrak senilai Rp135.811.035.026 (seratus tiga puluh miliar delapan ratus sebelas juta tiga puluh lima ribu dua puluh enam rupiah). Dalam permasalahan hukum ini pihak yang ikut terlibat yaitu PT BKI. Proses penyidikan dimulai pada 21 Juli 2025 yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, yang kemudian pada tanggal 11 Agustus 2025 dilanjutkan dengan proses penggeledahan yang dilakukan pada Kantor Regional 1 dan terdapat penyitaan dokumen-dokumen. At the end of 2025, the incumbent Director faced a legal issue. This legal issue related to alleged corruption in the procurement of two 1,800-tonne tugboats for Dumai Branch between PT Pelabuhan Indonesia (Persero) and PT Dok Perkapalan Surabaya (Persero), with a contract value of Rp135,811,035,026 (one hundred and thirty billion eight hundred and eleven million thirty-five thousand twenty-six rupiah). PT BKI was involved in this legal issue. The investigation began on July 21, 2025, by the North Sumatra High Prosecutor's Office. On August 11, 2025, a search was conducted at Regional Office 1, resulting in the seizure of documents.	Pada rentang waktu tanggal 25 September 2025 sampai dengan 25 Oktober 2025 kemudian terdapat penetapan tersangka, diantaranya Hosadi A Putra (PT Pelindo), Bambang Soendjaswono (PT DPS), dan Rudi Sunardi (PT BKI). Proses penahanan dilakukan sejak penetapan tersangka pada 25 September 2025 sampai dengan 26 Januari 2026 yang kemudian dilanjutkan pada proses persidangan pertama pada 12 Maret 2026. Between September 25, 2025, and October 25, 2025, the suspect Hosadi A. Putra (PT Pelindo), Bambang Soendjaswono (PT DPS), and Rudi Sunardi (PT BKI) were named as suspects. The detention process lasted from the suspect determination on September 25, 2025, to January 26, 2026, and then continued with the first trial on March 12, 2026.	Objek dugaan tindak pidana adalah pekerjaan 2 unit Kapal Tunda yang diperuntukan untuk Cabang Dumai yang tidak tuntas dikerjakan oleh PT DPS. Berdasarkan hasil perhitungan BPKP tanggal 17 Maret 2023, progres pekerjaan yaitu mencapai 14,82% dan tidak ada progres hingga saat ini, sehingga berpengaruh terhadap operasional Pelabuhan Cabang Dumai karena ketiadaan 2 unit Kapal Tunda dimaksud. Objek dugaan tindak pidana adalah pekerjaan 2 unit Kapal Tunda yang diperuntukan untuk Cabang Dumai yang tidak tuntas dikerjakan oleh PT DPS. Berdasarkan hasil perhitungan BPKP tanggal 17 Maret 2023, progres pekerjaan yaitu mencapai 14,82% dan tidak ada progres hingga saat ini, sehingga berpengaruh terhadap operasional Pelabuhan Cabang Dumai karena ketiadaan 2 unit Kapal Tunda dimaksud. The alleged crime is unfinished work on two tugboats for Dumai Branch Port, which was completed by PT DPS. Based on BPKP's calculations as of March 17, 2023, the work progress was 14.82%, with no progress to date, impacting the operation of Dumai Branch Port due to the absence of two tugboats.

PERMASALAHAN HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI ANAK PERUSAHAAN

LEGAL ISSUES CURRENTLY FACED BY SUBSIDIARIES

Pokok Perkara / Gugatan Issue / Lawsuit	**Status Penyelesaian** Settlement Status	**Pengaruhnya terhadap kondisi Perusahaan** Impact on the Company's Condition
Pada akhir tahun 2025, terdapat permasalahan hukum yang sedang dihadapi anak peusahaan. Permasalahan hukum dimaksud terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pekerjaan Pengerukan Kolam Pelabuhan Tanjung Perak yang dilaksanakan oleh PT Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) berdasarkan penunjukan dari PT Pelindo. PT APBS melaksanakan pengerukan kolam pelabuhan yang dilakukan oleh mitranya yaitu PT Pengerukan Indonesia (Rukindo) dan PT Samudera Atlantis Indonesia. At the end of 2025, a subsidiary faced a legal issue. This legal issue related to alleged corruption in the dredging work of Tanjung Perak Port Basin, carried out by PT Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) upon appointment by PT Pelindo. PT APBS is in charge of the dredging of port basin, which was carried out by its partners, PT Pengerukan Indonesia (Rukindo) and PT Samudera Atlantis Indonesia.	Proses penyelidikan dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Perak pada tanggal 12 Juli 2025, yang kemudian dilanjutkan proses penyidikan pada 11 Agustus 2025. Pada 9 Oktober 2025, Kejaksaan Negeri Tanjung Perak melakukan penggeledahan pada kantor Regional 3 dan PT APBS. Dalam perkembangannya, pada 3 November 2025 dilakukan penyitaan uang sebesar Rp70 Miliar dari kas PT APBS. Penetapan tersangka terjadi pada 27 November 2025, terdapat 6 pegawai dan mantan pegawai Pelindo yang ditetapkan sebagai tersangka diantaranya Ardhy Wahyu Basuki, Hendiek Eko Setianto, Era Hayu Handayani, Firmaniansyah, Made Yuni Christina, dan Dwi Wahyu Setyawan. Proses penahanan dilakukan sejak penetapan tersangka sampai dengan akhir bulan Maret 2026 yang kemudian dilanjutkan dengan agenda persidangan pada 1 April 2026 dengan agenda sidang pembacaan surat dakwaan. Tanjung Perak District Attorney's Office conducted an investigation on July 12, 2025, followed by a subsequent investigation on August 11, 2025. On October 9, 2025, Tanjung Perak District Attorney's Office conducted a search of the Regional 3 office and PT APBS. As a result, on November 3, 2025, Rp70 billion was confiscated from PT APBS's cash. The suspects were named on November 27, 2025, with six current and former Pelindo employees named as suspects: Ardhy Wahyu Basuki, Hendiek Eko Setianto, Era Hayu Handayani, Firmaniansyah, Made Yuni Christina, and Dwi Wahyu Setyawan. The detention process lasted from the time of suspect determination until the end of March 2026, followed by a trial on April 1, 2026, with the indictment being read.	Perkara ini tidak berpengaruh secara langsung terhadap operasional perusahaan, karena pekerjaan pengerukan telah diselesaikan oleh PT APBS. Terjadi penyitaan uang di PT APBS sebesar Rp70Miliar dari Penyidik Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, sehingga berdampak pada keuangan PT APBS. This case did not directly impact the company's operations, as the dredging work had already been completed by PT APBS. The seizure of Rp70 billion in cash at PT APBS by investigators from Tanjung Perak District Attorney's Office has impacted PT APBS's finances.

SANKSI ADMINISTRATIF YANG DIKENAKAN KEPADA PERUSAHAAN, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI OLEH OTORITAS PASAR MODAL DAN OTORITAS LAINNYA

Selama tahun 2025, tidak terdapat Sanksi Administratif yang Dikenakan Kepada Perusahaan, Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Oleh Otoritas Pasar Modal dan Otoritas Lainnya.

ADMINISTRATIVE SANCTIONS IMPOSED ON THE COMPANY, MEMBERS OF BOARD OF COMMISSIONERS, AND BOARD OF DIRECTORS BY CAPITAL MARKET AUTHORITIES AND OTHER AUTHORITIES

During 2025, there were no administrative sanctions imposed on the Company, members of Board of Commissioners, or Board of Directors by capital market authorities or other authorities.

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

Perseroan akan mengungkapkan informasi secara lengkap, akurat, dan tepat waktu kepada Pemegang Saham dan Dewan Komisaris. Pengungkapan informasi kepada Publik dan *Stakeholders* lainnya dilakukan secara wajar, dengan memperhatikan klasifikasi informasi, kepentingan Perseroan dan kebutuhan pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setiap jajaran Perseroan tidak diperkenankan melakukan pengungkapan informasi yang bertentangan dengan peraturan dan etika bisnis, antara lain:

ACCESS TO COMPANY INFORMATION AND DATA

The Company discloses complete, accurate and timely information to Shareholders and Board of Commissioners. Disclosure of information to the Public and other Stakeholders is carried out reasonably, taking into account the classification of information, the interests of the Company and the needs of interested parties in accordance with applicable regulations. Each line of the Company is not allowed to disclose information that is contrary to regulations and business ethics, including:

1. Mengungkapkan informasi yang salah;
2. Mengungkapkan informasi yang tidak seluruhnya benar;
3. Mengungkapkan informasi yang tidak lengkap;
4. Perseroan melarang penggunaan informasi oleh Orang Dalam, termasuk data/informasi yang berasal dari Anak Perusahaan yang sudah tercatat di Bursa Efek dan belum diungkap ke publik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, kelompok, atau orang lain secara tidak sah dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Perseroan melarang memperbincangkan tentang informasi rahasia dengan keluarga atau pihak di luar Perseroan, atau membicarakannya di tempat-tempat umum di luar lingkungan Perseroan;
6. Pengungkapan Informasi Biasa dapat dilakukan oleh setiap jajaran Perseroan;
7. Pengungkapan Informasi Terbatas kepada pihak lain dapat dilakukan oleh Pejabat di bawah Direktur terkait atau Pejabat lainnya yang secara khusus ditunjuk oleh Direksi;
8. Pengungkapan Informasi Rahasia kepada pihak lain dapat dilakukan, dimana Direktur atau Pejabat Perseroan dapat ditugasi oleh Direksi untuk meminta persetujuan tertulis dari Direktur Utama atau Direktur terkait;
9. Informasi yang belum terklasifikasi tidak dapat diungkapkan pihak lain sebelum informasi tersebut ditetapkan klasifikasinya oleh Direksi.

Pengungkapan informasi Perseroan harus memperhatikan tingkat *urgency* dan manfaat bagi Perseroan. Informasi Biasa Perseroan yang dipublikasikan dapat diperoleh atau diakses dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

Sebagai bentuk pelaksanaan keterbukaan informasi Perseroan kepada para pemangku kepentingan maupun masyarakat umum, Perseroan telah menyediakan informasi secara tepat waktu, relevan, memadai, jelas, akurat, dan mudah diakses melalui berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik.

1. Disclosing false information;
2. Disclosing information that is not entirely correct;
3. Disclosing incomplete information;
4. The Company prohibits the use of information by Insiders, including data/information originating from Subsidiaries that have been listed on the Stock Exchange and have not been disclosed to the public, with the intention of benefiting themselves, groups, or others illegally and contrary to applicable laws and regulations;
5. The Company prohibits discussing confidential information with family or parties outside the Company, or discussing it in public places outside the Company;
6. Disclosure of Ordinary Information can be done by every line of the Company;
7. Disclosure of Restricted Information to other parties may be made by Officers under the relevant Director or other Officers specifically appointed by Board of Directors;
8. Disclosure of Confidential Information to other parties may be made, where a Director or Officer of the Company may be assigned by the Board of Directors to seek written approval from President Director or relevant Director;
9. Unclassified information cannot be disclosed to other parties before the information is classified by Board of Directors.

The disclosure of the Company's information must pay attention to the level of urgency and benefits for the Company. The Company›s published Ordinary Information can be obtained or accessed quickly and on time, at low cost, and in a simple manner.

As a form of implementation of the Company's information disclosure to stakeholders and the general public, the Company has provided information in a timely, relevant, adequate, clear, accurate, and easily accessible manner through various media, both print and electronic media.

Kantor Pusat | *Head Office:*
Jl. Pasoso No. 1, Tanjung Priok
Jakarta Utara 14310, Indonesia
Telp: 021 4301080
Email: info@pelindo.co.id
Web: www.pelindo.co.id

Sekretaris Perusahaan | Corporate Secretary:
Ali Mulyono
Email: corp_sec@pelindo.co.id

Media Sosial | Social Media:
Facebook: BUMN Pelabuhan Indonesia
X: @indonesiaport
Instagram: @pelindo
Youtube: Pelindo

INVESTOR RELATION

INVESTOR RELATION

Corporate Finance and Investor Relation:
Phone: +6221-4301080
Web: www.pelindo.co.id
Email: investor_relations@pelindo.co.id

@pelindo
BUMN Pelabuhan Indonesia
Pelindo
@indonesiaport

Kegiatan investor relation selama tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Investor relations activities during 2025 are as follows.

No	Tanggal Date	Judul Kegiatan Meeting dengan Investor Title of Investor Meeting Activity
1	1-11 Juli 2025 July 1-11, 2025	Global Non Deal Roadshow
2	6 November 2025 November 6, 2025	Annual Review Meeting dengan Moody's Investors Service
3	8 Mei 2025 May 8, 2025	Annual Review Meeting dengan Fitch Ratings
4	8 Oktober 2025 October 8, 2025	Management Meeting dengan Pefindo

SIARAN PERS

PRESS RELEASE

No.	Tanggal Date	Siaran Pers Press Release
1.	26 Desember 2025 December 26, 2025	Arus Penumpang Nataru 2025/2026 H-1 Capai 962 Ribu, Pelindo Pastikan Layanan Pelabuhan Tetap Optimal 2025/2026 Christmas and New Year Passenger Flow on D-1 Reached 962,000, Pelindo Ensured Port Services Remain Optimal
2.	22 Desember 2025 December 22, 2025	Kolaborasi Efektif Dengan Shipping Line, IPC TPK Layani Adhoc Service Tambahan Effective Collaboration with Shipping Lines, IPC TPK Provides Additional Ad-hoc Services
3.	22 Desember 2025 December 22, 2025	Jelang Libur Nataru, Menko AHY Tinjau Kesiapan Layanan Pelindo di Terminal Penumpang Tanjung Priok Ahead of the Christmas and New Year Holidays, Coordinating Minister AHY Inspected Pelindo's Service Readiness at Tanjung Priok Passenger Terminal
4.	16 Desember 2025 December 16, 2025	Pelindo Regional 2 Banten Optimalkan Pelabuhan Ciwandan, Antisipasi Peningkatan Volume Angkutan Nataru 2025/2026 Pelindo Regional 2 Banten Optimized Ciwandan Port to Anticipate Increased Christmas and New Year Transportation Volume in 2025/2026
5.	15 Desember 2025 December 15, 2025	Pelindo Pastikan 63 Terminal Penumpang Siap Sambut Nataru 2025/2026 Pelindo Ensured 63 Passenger Terminals Are Ready for Christmas and New Year 2025/2026
6.	15 Desember 2025 December 15, 2025	Perkuat Produktivitas Terminal, TPK Koja Sambut Kedatangan Alat Baru Strengthening Terminal Productivity, TPK Koja Welcomes New Equipment
7.	15 Desember 2025 December 15, 2025	Quatrick! Empat Tahun Berturut-turut Pelindo Pertahankan Predikat Informatif dari Komisi Informasi Pusat Quatrick! Pelindo Maintains Informative Status from the Central Information Commission for Four Consecutive Years
8.	11 Desember 2025 December 11, 2025	Pelindo meraih penghargaan The Best Industry Marketing Champion 2025 for the Infrastructure, Utilities, & Energy sector dari MarkPlus, Inc. Pelindo Received the Best Industry Marketing Champion 2025 for the Infrastructure, Utilities, & Energy Sector from MarkPlus, Inc.

No.	Tanggal Date	Siaran Pers Press Release
9.	9 Desember 2025 December 9, 2025	Aktivitas di Terminal Kijing Terus Meningkat, Pelindo Akan Bangun Dermaga Baru Activity at Kijing Terminal Continues to Increase, Pelindo to Build a New Pier
10.	6 November 2025 November 6, 2025	Pelindo menerima kunjungan Port Authority of Thailand Pelindo Received a Visit from the Port Authority of Thailand
11.	10 Oktober 2025 October 10, 2025	Perkuat Sinergi Strategis Dengan Pemda Bali, Pelindo Tandatangani 2 MoU Sekaligus Strengthening Strategic Synergy with Bali Regional Government, Pelindo Signed 2 MoUs Simultaneously
12.	23 September 2025 September 23, 2025	Peringati Hari Maritim Nasional 2025, Pelindo Regional 4 Kick Off Rehabilitasi Mangrove di Bone Commemorating National Maritime Day 2025, Pelindo Regional 4 Kicks Off Mangrove Rehabilitation in Bone
13.	17 September 2025 September 17, 2025	Pelindo Raih Juara Umum Lomba Harhubnas Kemenhub 2025 Pelindo Won First Place in the Ministry of Transportation's 2025 National Transportation Day Competition
14.	16 September 2025 September 16, 2025	Pelindo Dukung Layanan Kapal Perang TNI di Pelabuhan Pelindo Supported Indonesian National Armed Forces Warship Services at Ports
15.	16 September 2025 September 16, 2025	AHY Kunjungi Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu, Tinjau Progres Pelaksanaan Inpres AHY Visited Pulau Baai Port in Bengkulu, Inspected Progress of Presidential Instruction Implementation
16.	5 September 2025 September 5, 2025	Pemprov Sulsel Dukung Pengembangan Pelabuhan Pelindo South Sulawesi Provincial Government Supports Pelindo Port Development
17.	29 Agustus 2025 August 29, 2025	Dapen Pelindo Purnakarya Raih Penghargaan ADPI Award Nasional 2025 Pelindo Purnakarya Pension Fund Received 2025 National ADPI Award
18.	26 Agustus 2025 August 26, 2025	Rapat Kerja TJSL 2025 2025 Corporate Social Responsibility (CSR) Working Meeting
19.	22 Agustus 2025 August 22, 2025	Terminal Batang Pelindo di KITB Siap Beroperasi, Dukung Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Pelindo Batang Terminal at KITB Ready for Operation, Supporting Economic Growth in Central Java
20.	15 Agustus 2025 August 15, 2025	Peringatan HUT RI : Pelindo Petikemas Tanam Seribu Pohon Hijaukan Area Kerja Indonesian Independence Day Commemoration: Pelindo Petikemas Planted One Thousand Trees for the Greening of Work Area
21.	14 Agustus 2025 August 14, 2025	Pelindo Dukung Penegakan Hukum Pemusnahan Pakaian Bekas Ilegal Pelindo Supported Enforcement Illegal Used Clothing Destruction Law
22.	14 Agustus 2025 August 14, 2025	Pelindo dan BPS Kolaborasi Tingkatkan Kualitas Data Statistik Jasa Kepelabuhanan Pelindo and BPS Collaborated to Improve Port Services Statistical Data Quality
23.	9 Agustus 2025 August 9, 2025	Pelindo Kembali Masuk Fortune 500 Southeast Asia Pelindo Re-Entered into Fortune 500 Southeast Asia
24.	8 Agustus 2025 August 8, 2025	Pertumbuhan Ekonomi 5,12% Terefleksi pada Arus Peti Kemas yang Tumbuh Lebih dari 6% 5.12% Economic Growth Reflected in Over 6% Growth in Container Flow
25.	6 Agustus 2025 August 6, 2025	Pelindo Sukses Layani Kapal RoRo Jumbo Kapasitas 7000 Unit Mobil Pelindo Successfully Serves Jumbo RoRo Ships with a Capacity of 7,000 Cars
26.	5 Agustus 2025 August 5, 2025	Pelindo Raih Juara 1 BUMN Type B dalam Ajang PaDi UMKM Hybrid Expo & Conference 2025 Pelindo Won First Place in the Type B State-Owned Enterprises (BUMN) Competition at the PaDi UMKM Hybrid Expo & Conference 2025
27.	31 Juli 2025 July 31, 2025	TPK Bangendang Tambah 1 Unit Alat Quay Container Crane, Optimis Layanan Jadi Lebih Baik TPK Bangendang Added 1 Quay Container Crane, Optimistic About Improved Services
28.	30 Juli 2025 July 30 2025	Pelindo dan KSOP Cilacap Lakukan Aksi Heroik Evakuasi Kapal Misi Kemanusiaan dan Kebudayaan Arka Kinari yang Alami Blackout Pelindo and KSOP Cilacap Performed Heroic Action to Evacuate the Arka Kinari Humanitarian and Cultural Mission Ship After a Blackout
29.	28 Juli 2025 July 28, 2025	Laba Usaha Meningkat, Kinerja SPJM Semakin Melesat Business Profit Increased, SPJM Performance Soars
30.	17 Juli 2025 July 17, 2025	Antrian Kendaraan Penyeberangan Ketapang Gilimanuk Padat, Operasional Pelindo Tanjung Wangi Masih Lancar Vehicle Queues at Ketapang-Gilimanuk Ferry Crossing Are Dense, Pelindo Tanjung Wangi Operations Remain Smooth

No.	Tanggal Date	Siaran Pers Press Release
31.	15 Juli 2025 July 15, 2025	Kompak Tekan Polusi, Pelindo dan KLH Gelar Uji Emisi di Pelabuhan Tanjung Priok Pelindo and the Ministry of Environment (KLH) Collaborated to Reduce Pollution by Conducting Emission Testing at Tanjung Priok Port
32.	14 Juli 2025 July 14, 2025	Pelindo Catat Arus Peti Kemas Ekspor Impor Semester 1 Tumbuh 13,64 Persen Pelindo Recorded 13.64 Percent Growth in Export-Import Container Throughput in First Semester
33.	11 Juli 2025 July 11, 2025	Pelabuhan Pulau Baai Siap Beroperasi Secara Optimal, Menhub Apresiasi Pelindo Pulau Baai Port Ready for Optimal Operations, Minister of Transportation Commends Pelindo
34.	20 Juni 2025 June 20, 2025	Terminal Kendaraan Makin Kinclong, IPCC Hadiahi Investor Dengan Dividen Final Fantastis Vehicle Terminals Shine Brighter, IPCC Rewards Investors with Impressive Final Dividends
35.	19 Juni 2025 June 19, 2025	Pelindo Dorong Sinergi Maritim Asia Tenggara di ASEAN Ports and Logistics 2025 Pelindo Promotes Southeast Asian Maritime Synergy at ASEAN Ports and Logistics 2025
36.	6 Juni 2025 June 6, 2025	Iduladha 1446 H, Pelindo Salurkan 924 Hewan Qurban untuk Masyarakat Eid al-Adha 1446 H, Pelindo Distributed 924 Qurbani Animals to the Community
37.	25 Mei 2025 May 25, 2025	Pelindo Jelaskan Strategi Pengembangan Pariwisata Maritim Indonesia di IMW 2025 Pelindo Explained Indonesia's Maritime Tourism Development Strategy at IMW 2025
38.	28 Mei 2025 May 28, 2025	Wapres Dukung Percepatan Normalisasi Alur Pelayaran Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu Vice President Supported Accelerated Normalization of Shipping Channels at Pulau Baai Port, Bengkulu
39.	21 Mei 2025 May 21, 2025	Luncurkan Customer Care Pelindo 102, Layanan Pelindo Makin Mudah Launch of Pelindo Customer Care 102 Makes Services Easier
40.	6 Mei 2025 May 6, 2025	Ciptakan Lingkungan yang Bersih, Pelindo Gelar Sosialisasi bagi PK5 di Pelabuhan Makassar Creating a Clean Environment, Pelindo Conducts Outreach for Street Vendors at Makassar Port
41.	3 Mei 2025 May 3, 2025	Sinergi Pelindo dan Kemenhub Dorong Investasi di Sektor Maritim Pelindo and Ministry of Transportation Synergy Encourages Investment in the Maritime Sector
42.	25 April 2025 April 25, 2025	MS Insignia Tambat di Pelabuhan Celukan Bawang, Tutup Rekor Sejarah Cruise Tourism di Bali Utara MS Insignia Docks at Celukan Bawang Port, Ending Bali's Cruise Tourism History North
43.	24 April 2025 April 24, 2025	IPC TPK Layani Pelayaran Baru Ke Vietnam Dari Fesco Lines IPC TPK Serves New Sailings to Vietnam from Fesco Lines
44.	23 April 2025 April 23, 2025	Pasca Evaluasi Internal, Pelindo Jelaskan Detail Penyebab Kemacetan Following Internal Evaluation, Pelindo Explains Details of the Cause of Congestion
45.	21 April 2025 April 21, 2025	Lalu Lintas Priok Pulih, Pelindo Siapkan Solusi Jangka Panjang Priok Traffic Recovers, Pelindo Prepares Long-Term Solution
46.	13 April 2025 April 13, 2025	MS Seven Seas Voyager Sandar di Celukan Bawang, Perkuat Citra Buleleng sebagai Destinasi Kapal Pesiar Dunia MS Seven Seas Voyager Docks in Celukan Bawang, Strengthening Buleleng's Image as a Global Cruise Destination
47.	10 April 2025 April 10, 2025	Pemudik Lebaran 2025 Lewat Pelabuhan Pelindo Tembus 1,7 Juta Orang 2025 Eid Homecoming Travelers Through Pelindo Ports Reached 1.7 Million People
48.	23 Maret 2025 March 23, 2025	H-10 Pemudik Lewat Pelabuhan Pelindo Tembus 300 Ribu Orang D-10 Eid Homecoming Travelers Through Pelindo Ports Reached 300,000 People
49.	22 Maret 2025 March 22, 2025	Kunjungi Pelabuhan Balikpapan, Dirut Pelindo Pastikan Kelancaran Operasional & Berbagi Kebahagiaan dengan Masyarakat Sekitar Visiting Balikpapan Port, Pelindo President Director Ensures Smooth Operations & Shares Happiness with Local Community
50.	21 Maret 2025 March 21, 2025	Kesempatan Emas untuk Mahasiswa Berprestasi! A Golden Opportunity for Outstanding Students!
51.	17 Maret 2025 March 17, 2025	IPC TPK Berbagi Ratusan Sembako Gratis Di Bulan Ramadhan IPC TPK Distributed Hundreds of Free Food Packages During Ramadan
52.	17 Maret 2025 March 17, 2025	Resmi Dibuka Hari Ini, Cek Cara Pesan dan Ketentuan Tiket Mudik Gratis Bersama Pelindo Group Officially Open Today, Check Out How to Order and Terms and Conditions for Free Homecoming Tickets with Pelindo Group

No.	Tanggal Date	Siaran Pers Press Release
53.	14 Maret 2025 March 14, 2025	Pelindo Prediksi Arus Mudik Lebaran 2025 Naik 10 Persen Pelindo Predicted 10 Percent Increase in 2025 Eid Homecoming Traffic
54.	14 Maret 2025 March 14, 2025	Pelindo Siap Sukseskan Mudik Gratis Lebaran 2025 Pelindo Ready to Make the 2025 Free Homecoming Program a Success
55.	13 Maret 2025 March 13 2025	Pelindo Pastikan Kelancaran Operasional di 63 Terminal Penumpang, Ini Strateginya Pelindo Ensures Smooth Operations at 63 Passenger Terminals, Here's the Strategy
56.	7 Maret 2025 March 7, 2025	IPC TPK Susun Strategi Raih Target 2025 IPC TPK Formulated Strategy to Achieve 2025 Targets
57.	28 Februari 2025 February 28, 2025	Dubes Kanada H.E. Jess Dutton Kunjungi MNP, Jajaki Peluang Kerja Sama dengan Pelindo Canadian Ambassador H.E. Jess Dutton Visited MNP, Explored Collaboration Opportunities with Pelindo
58.	21 Februari 2025 February 21, 2025	Catat Sejarah, Pelabuhan Benoa Berhasil Sandarkan 3 Cruise Secara Bersamaan Historic Milestone: Benoa Port Successfully Berths Three Cruise Ships Simultaneously
59.	13 Februari 2025 February 13, 2025	Sinergi Pelindo dan Kemenhub Tingkatkan Pelayanan di Sektor Transportasi Laut Synergy Between Pelindo and Ministry of Transportation Enhances Maritime Transport Services
60.	9 Februari 2025 February 9, 2025	Tingkatkan Kesadaran K3, Pelindo Gelar Awareness untuk TKBM dan TK Bagasi Pelabuhan Makassar Raising OHS Awareness, Pelindo Conducts Training for Port Workers and Baggage Handlers in Makassar
61.	4 Februari 2025 February 4, 2025	Safety Forum Bulan K3 Nasional, Pelindo Regional 4 Komitmen Tingkatkan SDM National OHS Month Safety Forum: Pelindo Regional 4 Commits to Enhancing Human Capital
62.	1 Februari 2025 February 1, 2025	Sinergi Pelindo dan KAI Dukung Pengembangan Transportasi Publik Pelabuhan Tanjung Priok Layani Kedatangan Trainset Baru KAI Commuter dari China Pelindo and KAI Synergy Supports Public Transportation Development at Tanjung Priok Port to Serve the Arrival of New KAI Commuter Trainsets from China
63.	31 Januari 2025 January 31, 2025	Tingkatkan Keselamatan Kerja, Pelindo Serahkan 1.000 Rompi Safety kepada Sopir JPT Improving Occupational Safety, Pelindo Distributed 1,000 Safety Vests to JPT Drivers
64.	30 Januari 2025 January 30, 2025	Peduli Keselamatan dan Kesejahteraan, Pelindo Regional 3 Salurkan Sejumlah Bantuan ke TKBM Selama 2024 Caring for Safety and Welfare, Pelindo Regional 3 Distributed Assistance to Port Workers Throughout 2024
65.	23 Januari 2025 January 23, 2025	Aktif Dukung Program NLE, Pelindo Regional 4 Raih Apresiasi Active Support for National Logistics Ecosystem Program, Pelindo Regional 4 Received a Recognition
66.	15 Januari 2025 January 15, 2025	Nataru 2024/2025 Transport Runs Smoothly, Ministry of Transport Appreciates Pelindo 2024/2025 Christmas and New Year Holiday Transport Runs Smoothly, Ministry of Transport Appreciates Pelindo
67.	13 Januari 2025 January 13, 2025	Pemkab Boalemo Ajak Pelindo Bangun Negeri Melalui Pengembangan Pelabuhan Tilamuta Boalemo Regency Government Encourages Pelindo to Build the Nation Through Tilamuta Port Development
68.	11 Januari 2025 January 11, 2025	Libur Nataru, Pelindo Sukses Layani 1,9 Juta Penumpang dan 130 Ribu Kendaraan During the Christmas and New Year Holiday, Pelindo Successfully Served 1.9 Million Passengers and 130,000 Vehicles
69.	10 Januari 2025 January 10, 2025	Dukung Pembangunan Berkelanjutan, Pelindo Group Wilayah Kerja Makassar Bantu Masyarakat Kelola Sampah Supporting Sustainable Development, Pelindo Group in Makassar Working Area Helps Communities Manage Waste
70.	10 Januari 2025 January 10, 2025	Tingkatkan Kualitas Layanan, Pelindo Dukung Sektor Pariwisata di Makassar Improving Service Quality, Pelindo Supports the Tourism Sector in Makassar
71.	2 Januari 2025 January 2, 2025	H+7 Nataru, 1.4 Juta Pemudik dan 95 ribu kendaraan Melintasi Pelabuhan Pelindo D+7 of Christmas and New Year Holiday, 1.4 Million Travelers and 95,000 Vehicles Passed Through Pelindo Port

TRANSPARANSI PENYAMPAIAN LAPORAN

Perseroan berkomitmen untuk mematuhi kewajiban penyampaian laporan yang bersifat insidental maupun sektoral yang dimintakan oleh Regulator, Pemegang Saham, maupun pihak lain yang memiliki hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun laporan yang telah disampaikan selama tahun 2025 antara lain:

1. Laporan Truwulan I
2. Laporan Triwulan II
3. Laporan Triwulan III
4. Laporan Tahunan tidak diaudit (unaudited),
5. Laporan tahunan telah diaudit (audited)
6. Laporan Kinerja TJSL Triwulan I,II,III
7. Laporan Tahunan TJSL Tahunan (unaudited)
8. Laporan Tahunan TJSL audited
9. Laporan Manajemen
10. Laporan Internal Control Testing
11. Laporan Tata Kelola Terintegrasi

KODE ETIK

Pelindo menyadari akan pentingnya arti implementasi GCG sebagai salah satu alat untuk meningkatkan nilai dan pertumbuhan bisnis jangka panjang dan secara berkesinambungan, tidak hanya bagi Pemegang saham (*shareholder*) namun juga untuk segenap Pemangku Kepentingan (*stakeholder*) lainnya. Oleh karena itu, Perusahaan berkomitmen mengimplementasikan GCG secara konsisten yang salah satunya dilakukan melalui penerapan Pedoman Kode Etik Bisnis (*Code of Conduct*).

Pedoman Kode Etik Bisnis adalah sekumpulan komitmen yang terdiri dari Etika Profesional dan Etika Kerja Insan Pelindo yang memuat Panduan Perilaku Insan Pelindo, yang disusun untuk mempengaruhi, membentuk dan mengarahkan kesesuaian tingkah laku dengan nilai-nilai dan budaya Perseroan dalam mencapai visi dan misi.

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No PER-02/MBU/03/2023 Tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara. Berdasarkan aturan baru tersebut, perusahaan melakukan penyesuaian terhadap Pedoman Kode Etik Bisnis Perusahaan yang telah ditetapkan pada Peraturan Direksi Nomor HK.01/27/12/3/TKPT/UTMA/PLND-23 tanggal 27 Desember 2023 tentang Pedoman Kode Etik Bisnis PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

TRANSPARENCY IN REPORT SUBMISSION

The Company is committed to complying with the obligation to submit incidental and sectoral reports requested by Regulators, Shareholders, and other authorized parties in accordance with applicable laws and regulations. The reports submitted during 2025 include:

1. Quarterly Report I
2. Quarterly Report II
3. Quarterly Report III
4. Unaudited Annual Report
5. Audited Annual Report
6. Corporate Social Responsibility (CSR) Performance Report for Quarters I, II, and III
7. Annual Corporate Social Responsibility (CSR) Report (unaudited)
8. Audited Annual Corporate Social Responsibility (CSR) Report
9. Management Report
10. Internal Control Testing Report
11. Integrated Governance Report

CODE OF CONDUCT

Pelindo recognizes the importance of GCG implementation as a tool to increase long-term and sustainable business value and growth, not only for shareholders but also for all other stakeholders. Therefore, the Company is committed to consistently implementing GCG, one of which is through the implementation of the Code of Conduct.

The Code of Conduct is a set of commitments consisting of the Professional Ethics and Work Ethics of Pelindo employees that contain Pelindo People' Behavioral Guidance, which is prepared to influence, shape and direct behavioral conformity with the values and culture of the Company in achieving the vision and mission.

In order to implement the State-Owned Enterprises Ministerial Regulation No. PER-02/MBU/03/2023 dated March 3, 2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises. Based on these new rules, the Company made adjustments to the Company's Code of Business Ethics Guidelines which have been stipulated in Board of Directors Regulation Number HK.01/27/12/3/TKPT/UTMA/ PLND-23 dated December 27, 2023 concerning the Code of Business Ethics Guidelines of PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Berdasarkan aturan baru tersebut, perusahaan melakukan penyesuaian terhadap Pedoman Kode Etik Bisnis Perusahaan yang telah ditetapkan pada Peraturan Direksi Nomor HK.01/27/12/3/TKPT/UTMA/PLND-23 tanggal 27 Desember 2023 tentang Pedoman Kode Etik Bisnis PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud penerapan Pedoman Kode Etik Bisnis bagi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) adalah sebagai berikut:
   a. Setiap Insan Pelindo memahami bahwa segala aktivitas Perusahaan berlandaskan pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang meliputi Keterbukaan, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Ketidakberpihakan, Kewajaran dan Terpercaya;
   b. Mendorong seluruh Insan Pelindo untuk berperilaku baik dalam melaksanakan segala aktivitas Perusahaan;
   c. Menciptakan suasana kerja yang sehat dan nyaman dalam lingkungan Perusahaan;
   d. Membangun reputasi Perusahaan lebih baik;
   e. Meminimalisir peluang terjadinya penyimpangan.
2. Tujuan penerapan Pedoman Kode Etik Bisnis bagi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) adalah sebagai berikut:
   a. Sebagai komitmen bersama untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) secara profesional dan beretika dalam melakukan usaha;
   b. Sebagai panduan perilaku bagi seluruh Insan Pelindo yang harus dipatuhi dalam melaksanakan segala aktivitas bisnis;
   c. Sebagai landasan etis untuk bertindak dan berpikir serta mengambil keputusan yang terkait dengan Perusahaan;
   d. Mengembangkan hubungan yang harmonis, sinergi dan saling menguntungkan antara Insan Pelindo dan *stakeholders* lainnya dengan berlandaskan prinsip-prinsip korporasi yang sehat dan beretika, agar menjadi perusahaan yang berdaya saing tinggi.
   e. Setiap Insan Pelindo memahami dan berkomitmen menjalankan tanggung jawabnya untuk berperilaku sesuai pedoman tentang perilaku dan etika (*code of conduct*).

POKOK-POKOK KODE ETIK

Kode Etik Bisnis mencerminkan tindakan dan nilai-nilai yang menjadi panduan Insan Pelindo dalam berinteraksi dengan semua Pemangku Kepentingan (Karyawan, Pelanggan, Pemerintah, Vendor, dan Komunitas) untuk membangun hubungan jangka panjang yang bertujuan untuk memberikan informasi, pemahaman serta cara untuk melaporkan setiap pelanggaran atau ketidakjelasan terkait dengan etika profesional dan etika kerja. Kode etik Bisnis Perseroan mengatur terkait Etika Profesional dan Etika Kerja.

Enterprises. Based on these new rules, the Company made adjustments to the Company's Code of Business Ethics Guidelines which have been stipulated in Board of Directors Regulation Number HK.01/27/12/3/TKPT/UTMA/ PLND-23 dated December 27, 2023 concerning the Code of Business Ethics Guidelines of PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

PURPOSE AND OBJECTIVES

1. The purposes of implementing the Code of Conduct for PT Pelabuhan Indonesia (Persero) are as follows:
   a. Every Pelindo People understands that all Company's activities are based on the principles of good corporate governance which include Transparency, Accountability, Responsibility, Impartiality, Fairness and Trustworthiness;
   b. Encouraging all Pelindo people to behave well in carrying out all Company's activities;
   c. Creating a healthy and comfortable working atmosphere in the Company's environment;
   d. Build a better reputation of the Company;
   e. Minimize the chance of deviation.
2. The objectives of implementing the Code of Conduct for PT Pelabuhan Indonesia (Persero) are as follows:
   a. As a shared commitment to realize the vision and carry out the mission of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) in a professional and ethical manner of doing a business;
   b. As a behavioral guide for all Pelindo People that must be obeyed in carrying out all business activities;
   c. As an ethical basis for acting, thinking and making decisions related to the Company;
   d. Develop harmonious, synergistic and mutually beneficial relationships between Pelindo People and other stakeholders based on sound and ethical corporate principles, in order to become a highly competitive Company;
   e. Every Pelindo People understands and is committed to carrying out its responsibility to behave in accordance with the code of conduct.

PRINCIPLES OF CODE OF CONDUCT

The Code of Conduct reflects the actions and values that guide Pelindo People in interacting with all Stakeholders (Employees, Customers, Government, Vendors, and Communities) to build long-term relationships that aim to provide information, understanding and ways to report any violations or ambiguity regarding professional ethics and work ethics. The Company's Code of Conduct regulates Professional Ethics and Work Ethics.

1. Etika Profesional
   Etika Profesional yaitu etika yang berkaitan dengan bidang pekerjaan untuk memastikan kualitas dan proses yang dijalani sesuai dengan kaidah-kaidah dalam profesi serta sebagai acuan untuk berhubungan dengan Stakeholders. Dalam etika profesional mengatur mengenai:
   a. Hubungan dengan Pekerja
   b. Hubungan dengan Pemegang Saham
   c. Hubungan dengan Serikat Pekerja
   d. Hubungan dengan Pelanggan
   e. Hubungan dengan Vendor
   f. Hubungan dengan Kreditur
   g. Hubungan dengan Debitur
   h. Hubungan dengan Investor dan Lembaga Keuangan
   i. Hubungan dengan Pesaing
   j. Hubungan dengan Masyarakat, Komunitas dan Lingkungan
   k. Hubungan dengan Regulator dan Aparatur Pemerintah
   l. Hubungan dengan Sub Holding dan/atau Anak Perusahaan
   m. Hubungan dengan Pemangku Kepentingan Lain
2. Etika Kerja
   Etika Kerja yaitu sistem nilai atau norma yang digunakan dalam bekerja didasarkan pada kerja keras dan ketekunan yang diharapkan dapat meningkatkan karakter moral Insan Pelindo seperti kejujuran, keterbukaan, ketulusan dan loyalitas.
   a. Kepatuhan Terhadap Hukum, Peraturan Perundang-undangan dan Ketentuan Lainnya
   b. Benturan Kepentingan
   c. Korupsi dan Suap
   d. Anti Kecurangan (*Fraud*)
   e. Pencurian dan Penyelewengan Sejenisnya
   f. Pencucian Uang
   g. Gratifikasi (Pemberian dan Penerimaan Hadiah atau Imbalan, Jamuan, Hiburan dan Donasi
   h. Kesempatan yang Sama untuk Mendapatkan Pekerjaan dan Promosi
   i. Pendokumentasian dan Pencatatan Perusahaan
   j. Integritas Laporan Keuangan
   k. Kerahasiaan Data dan/atau Informasi
   l. Media, Komunikasi, dan Penyebaran Informasi
   m. Pengelolaan Arsip
   n. Perlindungan Harta Perusahaan
   o. Pengendalian Intern
   p. Perjalanan Dinas
   q. Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
   r. Aktivitas Politik dan Sosial
   s. Perilaku Etis Terhadap Sesama Pekerja
   t. Pelanggaran *Insider Trading*

1. Professional Ethics
   Professional Ethics, namely ethics related to the field of work in order to ensure the quality and processes carried out in accordance with the rules in the profession as well as as a reference for dealing with stakeholders. Professional ethics regulates:
   a. Relationship with Employees;
   b. Relationship with Shareholders;
   c. Relationship with Trade Union;
   d. Relationship with Customers;
   e. Relationship with Vendors;
   f. Relationship with Creditors;
   g. Relationship with Debtors;
   h. Relationship with Investors and Financial Institutions;
   i. Relationship with Competitors;
   j. Relationship with Society, Community and Environment;
   k. Relationship with Regulators and Government Apparatus;
   l. Relationship with Sub Holding and/or Subsidiaries; and
   m. Relationship with Other Stakeholders.
2. Work Ethics
   Work Ethics is a system of values or norms used in work based on hard work and perseverance, which is expected to improve the moral character of Pelindo People such as honesty, openness, sincerity and loyalty.
   a. Compliance with Laws, Legislations and Other Provisions;
   b. Conflict of Interest;
   c. Corruption and Bribery;
   d. Anti-fraud;
   e. Theft and Other Misappropriation;
   f. Money Laundering;
   g. Gratification (Giving and Receiving of Gifts or Rewards, Meals, Entertainment and Donations);
   h. Equal Opportunity to Get Job and Promotion;
   i. Company's Documentation and Records;
   j. Financial Report Integrity;
   k. Confidentiality of Data and/or Information;
   l. Media, Communication and Information Dissemination;
   m. Archive Management;
   n. Company's Assets Protection;
   o. Internal Control;
   p. Service Travel;
   q. Intellectual Property Rights (HAKI);
   r. Political and Social Activities;
   s. Ethical Behavior towards Fellow Workers; and
   t. Insider Trading Violations.

KEPATUHAN TERHADAP KODE ETIK

Kode Etik Bisnis ini berlaku bagi seluruh Insan Pelindo yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Seluruh Karyawan Pelindo. Setiap tahun seluruh Insan Pelindo menandatangani Pakta Integritas dan Kepatuhan Kode Etik Bisnis.

Setiap tahun seluruh Insan Pelindo menandatangani Pakta Integritas dan Kepatuhan Kode Etik Bisnis sebagai bentuk komitmen bersama atas kepatuhan kepada asas-asas GCG. Penandatanganan pakta integritas dan Kepatuhan Kode Etik Bisnis di Pelindo pada tahun 2023 tercapai penuh. Seluruh Dewan Komisaris, Direksi dan 100% Pegawai Pelindo telah menandatangani pakta integritas melalui sistem PGOOD.

COMPLIANCE WITH CODE OF CONDUCT

The Code of Conduct applies to all Pelindo People, i.e., Board of Commissioners, Board of Directors and all employees of Pelindo.

Every year, all Pelindo People sign the Integrity Pact and Compliance with the Code of Conduct as a form of joint commitment to comply with GCG principles. The signing of integrity pacts and compliance with the Code of Conduct in Pelindo in 2024 was fully achieved. The entire Board of Commissioners, Board of Directors and 100% of Pelindo people have signed an integrity pact through the PGOOD system.

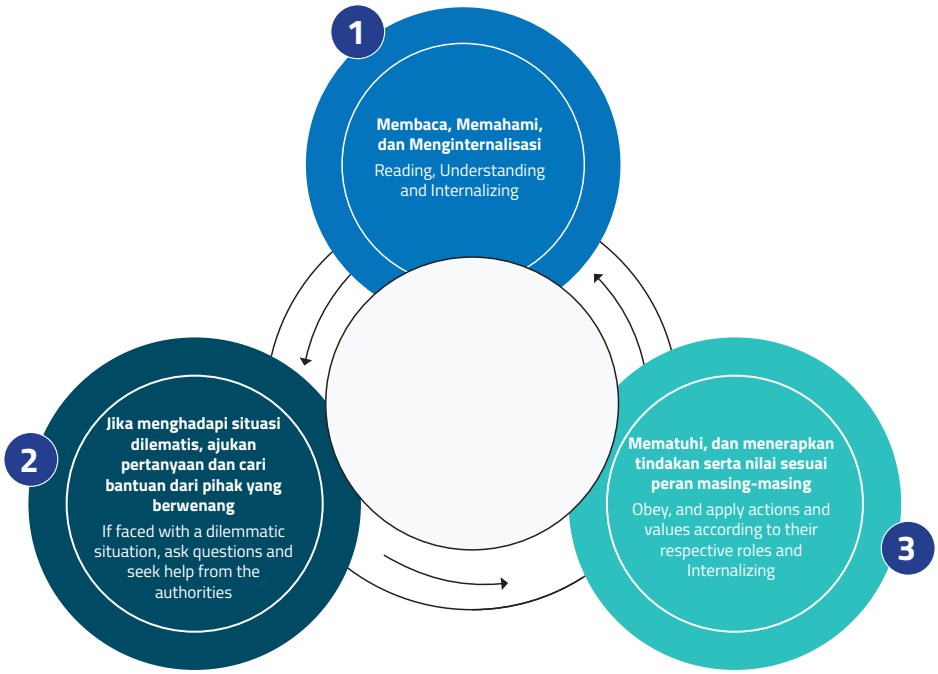

PENYEBARLUASAN KODE ETIK

Dalam rangka membangun kultur perusahaan berbasis nilai-nilai tata kelola perusahaan yang baik dan *corporate culture,* maka Perseroan melakukan sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Pedoman Kode Etik Bisnis kepada seluruh insan Pelindo secara berkala. Adapun kegiatan sosialisasi kode etik selama tahun 2025 adalah sebagai berikut.

1. Sepanjang tahun 2025 telah dilakukan sosialisasi terkait Peraturan Direksi tentang *Board Manual*, Gratifikasi, GCG, Kode Etik, Whistleblowing System dll sebanyak 50 kegiatan berupa penyampaian artikel, infografis, sosialisasi tatap muka, sosialisasi by digital (aplikasi internal) dan lainnya.

2. Sosialisasi disampaikan melalui media internal perusahaan (Pelindo E-Office, Email Blast, Majalah internal digital atau Pelindo Corner) dan kanal komunikasi perusahaan seperti website, e-office,

CODE OF CONDUCT SOCIALIZATION

To build a corporate culture based on the values of good corporate governance and corporate culture, the Company regularly disseminates and internalizes the values contained in the Code of Conduct to all Pelindo employees. The code of conduct socialization activities during 2025 are as follows:

1. Throughout 2025, 50 socialization activities related to the Board of Directors' Regulations concerning Board Manual, Gratuities, GCG, Code of Conduct, Whistleblowing System, etc. were conducted. These activities included the distribution of articles, infographics, face-to-face dissemination, digital dissemination (internal applications), and other activities.
2. Dissemination was delivered through internal company media (Pelindo E-Office, Email Blast, digital internal magazine or Pelindo Corner) and company communication channels such as the website, e-office,

Instagram, facebook, twitter yang dapat diakses oleh internal dan eksternal perusahaan;

3. Sosialisasi Tatap Muka terkait GCG, WBS, Kode Etik, Gratifikasi, Kepatuhan yang dilakukan pada:

   a. Tanggal 7 Maret 2025 sosialisasi antisipasi risiko fraud melalui media Zoom.
   b. Tanggal 17 September 2025 di PT Pelindo Terminal Petikemas Surabaya.
   c. Tanggal 18 September 2025 sosialisasi WBS dan GCG Ethical Practices at Pelindo (Zoom) oleh Indonesia Port English Community (IPEC) Business.
   d. Tanggal 12 November 2025 di acara CEO & Executive Talks GRC And Leadership Award 2025 Jakarta.
   e. Tanggal 19 November 2025 di acara Series Pembinaan Tematik Compliance Readiness dan Tata Kelola Terintegrasi PT Hutama Karya.
   f. Tanggal 2 Oktober 2025 sosialisasi WBS pengendalian gratifikasi dan SMAP melalui Zoom oleh PT Pelabuhan Tanjung Priok.
   g. Tanggal 22 Desember 2025 di acara Hari Anti Korupsi Sedunia oleh PT Indonesia Kendaraan Terminal, Tbk (IPCC).
4. Pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi pembangunan whistleblowing system Tindak Pidana Korupsi (TPK) Terintegrasi bersama KPK RI pada tanggal 28 Oktober 2025
5. Pertemuan dengan Maritime Anti Corruption Network (MACN) untuk membahas MoU.
6. Pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi program pengendalian gratifikasi bersama KPK RI di Bulan Agustus 2025.
7. Pelaksanaan *E-Learning* penguatan pemahaman gratifikasi yang dilakukan oleh KPK RI pada tanggal 15 sampai 22 Mei 2025 sebanyak 200 pekerja dengan metode *online Self-Learning.*

UPAYA PENERAPAN DAN PENEGAKAN KODE ETIK

Dalam rangka mewujudkan komitmen Perusahaan terhadap para pemangku kepentingan (*stakeholders*), maka seluruh Insan Pelindo memiliki komitmen untuk:

1. Senantiasa berpikir dan berperilaku secara korporasi dengan mengutamakan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi dan/atau kelompok untuk memberikan yang terbaik bagi Perusahaan;
2. Senantiasa peduli dan menjaga citra baik serta reputasi Perusahaan;
3. Melaksanakan tugas secara profesional dengan penuh tanggung jawab serta menjunjung tinggi integritas, kejujuran, dan semangat kebersamaan;
4. Peduli dan tanggap terhadap keluhan pelanggan/ mitra bisnis dan dengan segera menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Instagram, Facebook, and Twitter, accessible to both internal and external parties.

3. Face-to-face dissemination activities related to GCG, WBS, the Code of Conduct, Gratuities, and Compliance were conducted at:
   a. March 7, 2025, a socialization on fraud risk anticipation via Zoom.
   b. September 17, 2025, at PT Pelindo Terminal Petikemas Surabaya.
   c. September 18, 2025, a socialization on the WBS and GCG Ethical Practices at Pelindo (Zoom) by the Indonesia Port English Community (IPEC) Business.
   d. November 12, 2025, at the CEO & Executive Talks GRC and Leadership Award 2025 event in Jakarta.
   e. November 19, 2025, at the Thematic Development Series for Compliance Readiness and Integrated Governance at PT Hutama Karya.
   f. October 2, 2025, a socialization on the WBS for controlling gratification and SMAP via Zoom by PT Pelabuhan Tanjung Priok.
   g. December 22, 2025, at the World Anti-Corruption Day event by PT Indonesia Kendaraan Terminal, Tbk (IPCC).
4. Implementation of monitoring and evaluation of the development of an Integrated Corruption Crime (TPK) whistleblowing system with the Corruption Eradication Commission (KPK) on October 28, 2025.
5. Meeting with the Maritime Anti-Corruption Network (MACN) to discuss the MoU.
6. Implementation of monitoring and evaluation of the gratification control program with KPK in August 2025.
7. Implementation of e-learning to strengthen understanding of gratification by KPK from May 15 to 22, 2025, for 200 employees using an online self-learning method.

CODE OF CONDUCT IMPLEMENTATION AND ENFORCEMENT EFFORTS

In order to realize the Company's commitment to stakeholders, all Pelindo People are committed to:

1. Always think and behave in a corporate manner by prioritizing the interests of the Company above personal and/or group interests and to provide the best for the Company;
2. Always care and maintain the good image and reputation of the Company;
3. Carry out duties professionally with full responsibility and uphold integrity, honesty, and the spirit of togetherness;
4. Care and respond to customer/business partner complaints and immediately follow up in accordance with applicable regulations;

5. Memiliki motivasi yang kuat untuk mengembangkan diri dan memperluas pengetahuan serta bersedia berbagi pengetahuan (*sharing knowledge*) dan keterampilan serta membantu rekan kerja lainnya tanpa merasa takut tersaingi;
6. Selalu bersikap terpuji sebagai individu dan anggota masyarakat dan tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat menurunkan citra Perusahaan;
7. Menghindarkan diri dari seluruh tindakan yang dapat melanggar ketentuan dan atau menyalahgunakan wewenang;
8. Melaksanakan ibadah agama yang dianut oleh masing-masing Insan Pelindo dengan baik serta memahami dan mematuhi etika dan perilaku;
9. Bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Oleh sebab itu sebagai perwujudan Komitmen diatas maka:

1. Seluruh Insan Pelindo wajib menandatangani Pakta Integritas dan Janji Pedoman Kode Etik Bisnis yang merupakan komitmen Insan Pelindo untuk melaksanakan Pedoman Kode Etik Bisnis yang diperbaharui setiap tahun;
2. Pedoman Kode Etik Bisnis harus disosialisasikan dan dipahami oleh Insan Pelindo;
3. Pakta Integritas, Janji Pedoman Kode Etik Bisnis dan Pernyataan Benturan Kepentingan Dewan Komisaris dan Direksi dibuat dan ditandatangani dalam satu rangkap dan disimpan di Sekretaris Perusahaan;
4. Pakta Integritas dan Janji Pedoman Kode Etik Bisnis Pekerja Perusahaan dibuat dan ditandatangani pada sistem P-Good (Pelindo *Good Corporate Governance*);
5. Adapun unit kerja di Kantor Pusat (Departemen Head Tata Kelola dan Kepatuhan), Regional (Departemen Head Pelayanan SDM dan Umum), Sub Holding dan Anak Perusahaan (SVP Sekretariat Perusahaan) melakukan monitoring, membuat laporan dan rekapitulasi Pekerja Perusahaan yang melaksanakan penandatanganan Pakta Integritas di wilayah kerjanya masing - masing setiap tahunnya, untuk kemudian disampaikan kepada Group Head Manajemen Risiko, Tata Kelola dan Kepatuhan PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
6. Seluruh Pimpinan Unit Kerja sampai dengan pimpinan 2 (dua) level dibawahnya bertanggung jawab dan memberi keteladanan bagi bawahannya atas penerapan Pedoman Kode Etik Bisnis ini.

5. Have a strong motivation to develop themselves and expand their knowledge and are willing to share knowledge and skills as well as help other co-workers without fearing competition;
6. Always be commendable as an individual and a member of the community and not commit any disgraceful act that could degrade the Company's image;
7. Avoid all actions that may violate the provisions and or abuse authority;
8. Carry out religious worship adhered to by each Pelindo People properly, and understand and comply with ethics and behavior;
9. Work in accordance with the principles of Good Corporate Governance.

As an embodiment of the above commitments:

1. All Pelindo People are required to sign the Integrity Pact which are the commitments of Pelindo People to implement the Code of Conduct that is updated every year;
2. Code of Conduct must be socialized and understood by Pelindo People;
3. Integrity Pact, Promises of Code of Business Ethics Guidelines and Statements of Conflicts of Interest of Board of Commissioners and Board of Directors are made and signed in one copy and kept in Corporate Secretary;
4. The Integrity Pact and Code of Conduct Commitment for Company Employees are created and signed in the P-Good system (Pelindo Good Corporate Governance);
5. The work units at Head Office (Governance and Compliance Department Head), Regional Offices (Human Capital and General Services Department Head), SubHoldings, and Subsidiaries (SVP Corporate Secretariat) monitor, report, and summarize the employees who sign the Integrity Pact in their respective areas of work each year. This information is then presented to the Group Head of Risk Management, Governance, and Compliance at PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
6. All Heads of Work Units up to 2 (two) levels below are responsible for and set an example for their subordinates for the implementation of this Code of Conduct.

JENIS SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

TYPE OF SANCTION FOR VIOLATION OF CODE OF CONDUCT

Jenis Pelanggaran Type of Violation	**Sanksi** Sanction
Ringan Mild	• Teguran Tertulis • Teguran Lisan • Pernyataan Tidak Puas • Pemotongan Tunjangan posisi 5% selama 2 bulan • Written Reprimand • Oral Reprimand • Statement of Dissatisfaction • Position allowance deduction of 5% for 2 (two) months
Sedang Moderate	Pemotongan Penghasilan sebesar 20% selama 3 bulan Income deduction of 20% for 3 (three) months
Berat Severe	• Penurunan Kelas Jabatan 3 Tingkat Lebih Rendah • Pemutusan Hubungan Kerja • Demotion to 3 (three) Levels Lower • Dismissal of Employment

JUMLAH PELANGGARAN DAN SANKSI YANG DIBERIKAN

NUMBER OF VIOLATIONS AND SANCTIONS IMPOSED

NO	KATEGORI CATEGORY	KANTOR PUSAT HEAD OFFICE	REGIONAL 1	REGIONAL 2	REGIONAL 3	REGIONAL 4	SPMT	SPSL	SPTP	SPJM	Total
1	Presensi Presence	25	1	0	8	7	1	0	28	37	107
2	Penyalahgunaan Wewenang Abuse of Authority	3	0	0	0	2	11	0	3	1	20
3	Penggelapan Embezzlement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Penyalahgunaan Narkoba Drug Abuse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Pidana Crime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Asusila Immorality	1	1	0	0	0	2	0	0	0	4
7	Tindak Pidana Korupsi Corruption	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

KEBIJAKAN PEMBERIAN KOMPENSASI JANGKA PANJANG BERBASIS KINERJA

Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023, yang ditetapkan pada 20 Maret 2023, mengatur tentang Organ dan Sumber Daya Manusia di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Salah satu ketentuan penting dalam peraturan ini adalah mengenai penangguhan pembayaran tantiem dan insentif kinerja bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas BUMN. Perseroan telah melaksanakan proses penangguhan Tantiem/Insentif Kinerja Tahun Buku 2022 bagi Dewan Komisaris dan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) periode Tahun 2022 sebesar 21% dari keseluruhan Tantiem dengan jangka waktu penangguhan pembayaran

PERFORMANCE-BASED LONG-TERM COMPENSATION POLICY

Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) Number PER-3/MBU/03/2023, enacted on March 20, 2023, governs the Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises (SOEs). One of the key provisions in this regulation concerns the deferment of tantiem payments and performance incentives for members of Board of Directors and Board of Commissioners/Supervisory Board of SOEs. The Company has implemented the deferment process for 2022 fiscal year tantiem/performance incentives for Board of Commissioners and Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) for the 2022 period, amounting to 21% of the total tantiem,

tersebut harus dilakukan selama 3 tahun. Kemudian, Perseroan juga telah melaksanakan proses penangguhan Tantiem/ Insentif Kinerja Tahun Buku 2023 bagi Dewan Komisaris dan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) periode Tahun 2023 sebesar 21% dari keseluruhan Tantiem dengan jangka waktu penangguhan pembayaran tersebut harus dilakukan selama 3 tahun.

Selain itu, Perseroan belum memiliki kebijakan kompensasi jangka panjang berbasis kinerja. Di samping itu, Pelindo bukan merupakan Perusahaan Terbuka sehingga tidak memiliki Program Kepemilikan Saham oleh Pegawai dan/ atau Manajemen (ESOP/MSOP)

KEBIJAKAN PENGUNGKAPAN INFORMASI KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI SERTA PELAKSANAANNYA

Pelindo bukan merupakan Perusahaan Terbuka sehingga tidak terdapat informasi Kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka.

WHISTLEBLOWING SYSTEM

Whistleblowing system (WBS) atau yang disebut Pelindo Bersih diperkenalkan untuk memperkuat penerapan dalam rangka memberikan kesempatan kepada seluruh insan Pelindo dan *stakeholders* lainnya untuk dapat menyampaikan laporan mengenai indikasi pelanggaran terhadap nilai–nilai etika yang berlaku, berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggung-jawabkan serta dengan niat baik.

Pelindo Bersih adalah sebuah program nyata dari manajemen Pelindo beserta seluruh cabang pelabuhan dan grup perusahaan untuk mewujudkan tempat kerja yang bersih dari tindakan curang, korupsi dan pemerasan.

Dalam pengelolaan Whistblowing System, Pelindo aktif dalam melakukan koordinasi dan komunikasi dengan KPK RI khususnya pada kegiatan monitoring dan evaluasi WBS Tindak Pidana Korupsi (TPK) Terintegrasi dengan KPK. beberapa hal yang telah dilakukan adalah:

1. *Monitoring* dan evaluasi oleh KPK dilakukan secara semester
2. Pelindo telah melakukan pengelolaan komitmen pimpinan dengan melakukan pendantangan pakta integritas Dewan Komisaris, Direksi dan Tim Komite Pelindo Bersih untuk menciptakan pelabuhan bersih tanpa fraud, korupsi, kolusi dan nepotisme
3. Melakukan review terhadap kebijakan, SOP pengelolaan Whistblowing System dan tugas dan tanggung jawab Komite Pelindo bersih
4. Aktif dalam pembangunan budaya anti korupsi (sosialisasi) yang melibatkan pimpnan puncak

with the deferment period set at 3 years. Furthermore, the Company has also implemented the deferment process for the 2023 fiscal year tantiem/performance incentives for Board of Commissioners and Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) for the 2023 period, amounting to 21% of the total tantiem, with the deferment period likewise set at 3 years.

In addition, the Company does not yet have a long-term performance-based compensation policy. Moreover, Pelindo is not a publicly listed company and therefore does not have an Employee and/or Management Stock Ownership Program (ESOP/MSOP).

POLICY ON INFORMATION DISCLOSURE OF BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS SHARE OWNERSHIP AND THE IMPLEMENTATION

Pelindo is not a Public Company, hence there is no information on share ownership of members of Board of Directors and members of Board of Commissioners no later than 3 (three) working days after the ownership or any changes in the ownership of shares of Public Company.

WHISTLEBLOWING SYSTEM

Whistleblowing System (WBS) or what is known as Pelindo Bersih was introduced to strengthen its implementation in providing opportunities for all Pelindo people and other stakeholders to submit report regarding indications of violations of applicable ethical values, based on accountable evidence and with good intentions.

Pelindo Bersih is a tangible program from Pelindo management as well as the entire port branches and corporate groups to create a workplace that is clean from fraud, corruption and extortion.

In managing the Whistleblowing System, Pelindo is actively coordinating and communicating with the Indonesian Corruption Eradication Commission (KPK), especially in monitoring and evaluating the Corruption Crime (TPK) Whistleblowing System integrated with the KPK. Some of the things that have been done are:

1. Monitoring and evaluation by the KPK is carried out on a semester basis
2. Pelindo has managed the commitment of its leaders by signing an integrity pact with Board of Commissioners, Board of Directors and Pelindo Bersih Committee Team to create a clean port without fraud, corruption, collusion and nepotism
3. Review the policies, SOPs for managing the Whistblowing System and the duties and responsibilities of Pelindo Bersih Committee
4. Be active in building an anti-corruption culture (socialization) involving top management

5. Launching system baru Whistblowing system Pelindo pada tanggal 15 Oktober 2024. Saluran berubah menjadi https://pelindobersih.pelindo.co.id/ .Kelebihan sistem baru ini adalah : Sistem tersambung dengan saluran KPK RI (khusunya untuk laporan tindak pidana korupsi), identitas pelapor full anonimus, terstandarisasi ISO 37002:2021
6. Melakukan *survey* internal efektivitas WBS TPK Terintegrasi di lingkungan Pelindo. Surveu ini bertujuan untuk melihat dan menilai lapoan efektivitas penanganan laporan serta persepsi pekerja pelindo dan stakeholders terhadap tindak pindana korupsi di WBS Pelindo. Survei melibatkan seluruh unit dan wilayah kerja pelindo dengan total sebanyak 3.708 responden. Secara keseluruhan dari survei efektivitas WBS TPK Terintegrasi PT Pelindo dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden merasa system WBS telah berjalan dengan baik, terutama dalam menjaga kerahasiaan pelapor (75% setuju) dan perlindungan pelapor (85% setuju). Pegawai juga menunjukkan kesadaran tinggi terhadap kewajiban melapor (91% setuju) dan merasa puas dengan tindak lanjut laporan (86% setuju).

PENYAMPAIAN DAN MEDIA LAPORAN PELANGGARAN

Pelindo menyediakan aplikasi/sistem untuk melaporkan tindakan curang, korupsi, dan pemerasan bagi seluruh *stakeholder* yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan terindikasi pelanggaran yang dilakukan oleh insan Pelindo, cabang pelabuhan, dan grup perusahaan melalui sistem yang independen. Melalui sistem ini, Pelindo dapat menjadi perseroan yang lebih baik dan mempunyai daya saing baik di tingkat nasional dan internasional. Bagi insan Pelindo atau stakeholder yang melaporkan akan diberikan perlindungan, baik dalam hal kerahasiaan identitas maupun dari kemungkinan tindakan balasan oleh si terlapor.

Sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) adalah sistem yang digunakan untuk menerima, mengolah dan menindaklanjuti serta membuat pelaporan atas informasi yang disampaikan oleh pelapor mengenai pelanggaran yang terjadi di lingkungan perusahaan.

Telah dilakukan penyampaian surat terkait tindak lanjut pelaksanaan penerapan single WBS untuk pelindo group dimana di dalam nya juga terdapat perintah untuk melakukan publikasi terkait larangan pungli, praktik suap seta gratifikasi No SK.01.01/21/12/1/HLTI/WDUT/PLND-21 tanggal 21 Desember 2021. Sehingga saluran WBS Pelindo Group terkelola menjadi satu pintu di Kantor Pusat. Dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No PER-02/MBU/03/2023 Tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara. Berdasarkan aturan baru tersebut, Perseroan melakukan penyesuaian terhadap *Whistleblowing System* yang telah ditetapkan pada Peraturan Direksi Nomor SK.01.01/12/3/TKPT/UTMA/PLND-23 tanggal 13 Desember 2023 tentang Pedoman *Whistleblowing System* PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

5. Launching the new Pelindo Whistblowing system on October 15, 2024. The channel has changed to https://pelindobersih.pelindo.co.id/. The advantages of this new system are: The system is connected to the Corruption Eradication Commission (KPK) channel (especially for reports of corruption), reporter identity is fully anonymous, standardized ISO 37002:2021.
6. Conduct an internal survey of the effectiveness of WBS TPK Integrated in Pelindo. This survey aims to see and assess the report on the effectiveness of handling reports and the perception of Pelindo employees and stakeholders towards acts of corruption in WBS Pelindo. The survey involved all Pelindo units and work areas with a total of 3,708 respondents. Overall, from the survey on the effectiveness of Pelindo's Integrated TPK Whistleblower System (WBS), it can be concluded that the majority of respondents feel that the WBS system has been running well, especially in maintaining the whistleblower's confidentiality (75% agree) and protection (85% agree). Employees also showed high awareness of the obligation to report (91% agree) and felt satisfied with the report follow-up (86% agree).

SUBMISSION AND MEDIA FOR VIOLATION REPORTS

Pelindo provides an application/system to report fraudulent acts, corruption, and extortion for all stakeholders who have information and wish to report an act indicating a violation committed by Pelindo people, port branches, and corporate groups through an independent system. Through this system, Pelindo can become a better Company and have competitiveness both at the national and international level. Pelindo people or stakeholders who report will be given a protection, both in terms of identity confidentiality and from possible retaliation by the reported party.

The whistleblowing system is a system used to receive, process and follow up as well as make report on information submitted by the whistleblower regarding violation that occurred within the Company.

A letter has been submitted regarding the follow-up to the implementation of the single WBS implementation for the Pelindo group in which there is also an order to publish a publication regarding the prohibition of extortion, bribery and gratuities No SK.01.01/21/12/1/HLTI/WDUT/PLND-21 dated December 21, 2021. So that the Pelindo Group WBS channel is managed into one door at Head Office. In order to implement the Regulation of Minister of State-Owned Enterprises No. PER-02/MBU/03/2023 dated March 3, 2023, concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises. Based on this new regulation, the Company has made adjustments to the Whistleblowing System as stipulated in the Board of Directors Regulation No. SK.01.01/12/3/TKPT/UTMA/PLND-23 dated December 13, 2023, regarding the Whistleblowing System Guidelines of PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

PERLINDUNGAN BAGI WHISTLEBLOWER

1. Perseroan menjamin kerahasiaan identitas pelapor, kecuali apabila pengungkapan tersebut diperlukan dalam kaitan dengan laporan atau penyidikan yang dilakukan oleh pihak berwajib;
2. Pelaporan yang dilakukan tanpa identitas akan tetap di proses, namun demikian akan dipertimbangkan terlebih dahulu kesungguhan isi laporan, kredibilitas, dan bukti-bukti yang diajukan, serta kemungkinan untuk melakukan konfirmasi pelaporan;
3. Perseroan menetapkan sanksi atas penyalahgunaan saluran WBS dan ditegaskan bahwa para pihak yang menyampaikan laporan berupa fitnah atau laporan palsu akan diberikan sanksi termasuk proses hukum dan tidak memperoleh baik jaminan kerahasiaan maupun perlindungan Pelapor;
4. Perseroan menjamin terhadap pelapor dari segala tuntutan hukum, baik pidana maupun perdata, intimidasi, hukuman maupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun atas kesaksian dan/atau pelaporan yang akan, sedang atau telah diberikanya, kecuali kesaksian dan/atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik;
5. Perusahaan memberikan perlindungan kepada pelapor atas kemungkinan dilakukannya hal-hal sebagai berikut:
   a. Pemecatan yang tidak adil;
   b. Penurunan jabatan atas pangkat dengan alasan yang tidak jelas;
   c. Catatan yang merugikan dalam file data pribadinya (personal file record);

WHISTLEBLOWER PROTECTION

1. The Company guarantees the confidentiality of whistleblower's identity, except if the disclosure is required related to the report or investigation conducted by the authorities;
2. Report made without an identity will still be processed, however, the seriousness of the report content, credibility, and evidence submitted, as well as the possibility to confirm the report will be considered;
3. The Company stipulates sanctions for the misuse of WBS channel and emphasizes that parties who submit report in the form of slander or false report will be subject to sanctions including legal processes and does not receive either guarantees of confidentiality or Whistleblower protection;
4. The Company guarantees the whistleblower against all lawsuits, both criminal and civil, intimidation, punishment or unpleasant actions from any party for the testimony and/or reporting that will be, is being or has been given, unless the testimony and/or report is not submitted with good intention;
5. The Company provides protection to the whistleblower against the possibility of the following things:
   a. Unfair dismissal;
   b. Demotion of rank for unclear reasons;
   c. Adverse records in his/her personal file record;

6. Perusahaan menjamin kepentingan dan memberikan pendampingan hukum bagi pelapor pada saat sebelum dan setelah selesainya proses kasus terkait hal yang dilaporkan;
7. Perusahaan memberikan hak kepada pelapor untuk ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan kepetingan dan pendampingan hukum sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perusahaan.

PENANGANAN PENGADUAN

1. Pengelolaan WBS Pelindo Bersih dibantu oleh Pengelola Eksternal yang merupakan pihak ketiga independen. Pengelolaan oleh pihak ketiga independen termasuk pada aktivitas penerimaan, administrasi dan konfirmasi kelengkapan laporan yang kemudian diteruskan kepada Komite Pelindo Bersih;
2. Komite Pelindo Bersih melakukan verifikasi terhadap laporan yang disampaikan oleh pelapor untuk menentukan pemenuhan syarat/kriteria pengaduan;
3. Komite Pelindo Bersih selanjutnya memformulasikan hasil verifikasi dan identifikasi laporan;
4. Hasil verifikasi dituangkan dalam laporan Hasil verifikasi yang disusun secara sistematik, singkat, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan serta memuat kesimpulan serta dilengkapi data pendukung dan saran tindak lanjut;
5. Teknik verifikasi merupakan kerahasian dan kewenangan Komite Pelindo Bersih dengan prinsip-prinsip proporsional sebanding atas materi yang dilaporkan;
6. Jika diperlukan investigasi lebih lanjut, maka Komite Pelindo Bersih dapat meminta persetujuan Direktur Utama untuk pelaksanaan investigasi oleh fungsi Satuan Pengawasan Intern;
7. Apabila pengaduan tidak memenuhi syarat maka Komite Pelindo Bersih tidak menindaklanjuti dan pengaduan disimpan dalam *file* berkas pengaduan;
8. Hasil laporan yang telah dibahas dan disepakati disampaikan kepada Direktur Utama dan atau pihak terkait untuk ditindaklanjuti sesuai hasil investigasi;
9. Untuk tindak lanjut pelaporan Sub Holding, Anak Perusahaan, Perusahaan Afiliasi dan Anak Perusahaan Other Business Portofolio maka investasi akan dilakukan oleh Tim WBS dari masing-masing perusahaan. Sementara untuk pelaporan Regional, investigasi akan dibantu oleh Regional Head dan SVP Layanan SDM dan Umum Regional. Investigasi dapat melibatkan Tim Indisipliner, Pengendalian Internal, Hukum, Pengelola SDM dan Penanggung Jawab Operasional di wilayah kerja masing-masing hingga tindak lanjut dianggap selesai dengan tetap menjaga kerahasian laporan dan identitas pelapor;
10. Kepada pihak terlapor yang terbukti bersalah dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku di perusahaan dan/atau perundang-undangan. Penjatuhan hukuman dapat dilakukan oleh Tim Indisipliner masing-masing wilayah kerja sesuai dengan

6. The Company guarantees the interests and provides legal assistance to the whistleblower before and after the completion of the case process related to the reported matter;
7. The Company grants the right to the whistleblower to participate in the process of selecting and determining the form of interest protection and legal assistance as long as does not conflict with Company regulations.

COMPLAINT HANDLING

1. The management of Pelindo Bersih WBS is assisted by an External Manager who is an independent third-party entity with activities includes receiving, administering, and confirming the completeness of reports, which are then forwarded to Pelindo Bersih Committee.
2. Pelindo Bersih Committee verifies the submitted reports then determine compliance with the complaint criteria/requirements.
3. Pelindo Bersih Committee then formulates verification results and report identification.
4. Verification results are documented in a Verification Results report that is systematically, concisely, clearly, and accountably prepared, containing conclusions and supporting data, as well as follow-up recommendations.
5. Verification techniques are confidential and under Pelindo Bersih Committee authorization, guided by proportional principles aligned with the reported material.
6. If further investigation is required, Pelindo Bersih Committee may seek approval from President Director for the Internal Supervision Unit to conduct the investigation;
7. If a complaint does not meet the criteria, Pelindo Bersih Committee will not pursue it, and the complaint will be kept in the complaint file;
8. The discussed and agreed-upon report results are presented to the President Director and/or relevant parties for further action according to the investigation results.
9. For follow-up on reports from Sub Holdings, Subsidiaries, Affiliate Companies, and Other Business Portfolio Subsidiaries, the investigation will be carried out by WBS Team of each Company. Meanwhile, for Regional reporting, the investigation will be assisted by Regional Head and SVP of HC and General Services of the respective region. The investigation may involve Disciplinary Team, Internal Control, Legal, HC Management, and Operational Official in their respective areas until the follow-up is considered complete while maintaining reports confidentiality and reporters' identities.
10. Individuals found guilty may be subject to penalties according to the Company's regulations and/or laws. The imposition of penalties can be carried out by the Disciplinary Team in each work area according to the Relevant Disciplinary Regulations. The WBS

Peraturan Direksi Terkait Indisipliner. PIC WBS masing-masing wilayah kerja melaporkannya kepada Komite Pelindo Bersih;

11. Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tetap mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan di luar Tim Indisipliner dengan memperhatikan kepentingan perusahaan terutama untuk menjaga nama baik perusahaan dan efektivitas penanganan pengaduan tetapi tetap memberikan sanksi apabila terlampir terbukti bersalah.

PIC in each work area reports it to the Pelindo Bersih Committee;

11. The Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) retains the authority to take action outside of Disciplinary Team while considering the Company's interests, especially in maintaining the Company's reputation and effectiveness of handling complaints, but still imposes sanctions if proven guilty.

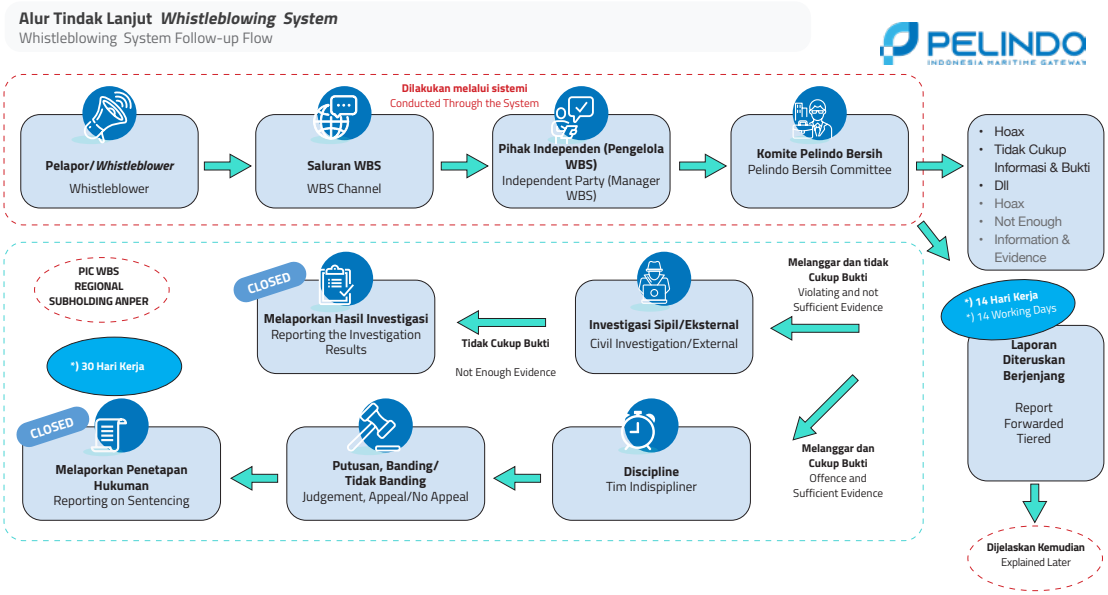

JENIS PELANGGARAN YANG DAPAT DILAPORKAN

Pelanggaran yang dapat dilaporkan adalah semua perbuatan yang menyimpang atau bertentangan dengan peraturan perusahaan, kode etik, melawan hukum dan segala perbuatan di luar ketentuan yang dapat mengakibatkan kerugian secara materiel maupun penurunan citra perusahaan.

Kategori pelanggaran meliputi:

1. **Tindakan Curang (Tidak Adil)**
   Adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang/ sekelompok Insan Pelindo dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan ataupun menggerakkan orang lain untuk memberikan keuntungan kepadanya dengan cara–cara yang tidak benar dan melawan hukum.

TYPES OF VIOLATIONS THAT CAN BE REPORTED

Violations that can be reported are all acts that deviate or conflict with Company regulations, code of conduct, against the law and all actions outside the provisions that can result in material losses or a decrease in the Company's image.

The categories of violation are:

1. Fraudulent Action
   It is an act committed by individual/a group of Pelindo People for personal benefit or others by using false identity or false dignity by trickery or lies or moving others to benefit him or her in prohibited and unlawful ways.

Contoh dari tindakan curang :

a. Menyetujui pemberian order kepada supplier yang memiliki “hubungan istimewa”;
b. Membayar atau tidak membayar vendor yang memiliki “hubungan istimewa”, yang secara langsung-tidak langsung memberi keuntungan komersial atau bentuk manfaat kompetitif lainnya bagi pada vendor lain;
c. Merekrut staf yang memiliki “hubungan istimewa” dengannya, sementara ada kandidat yang memiliki kualifikasi yang lebih baik.

Example of fraudulent action:

a. Approve an order to supplier with special relationship.
b. Paying or not paying vendors who have a “special relationship”, which directly or indirectly provides a commercial advantage or other form of competitive advantage to other vendors;
c. Recruit staff that has a “special relationship” with them while there are candidates with better qualifications.

2. Korupsi

Tindakan Insan Pelindo, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya orang orang yang memiliki “hubungan istimewa” dengannya, dengan menyalah gunakan jabatan dan kekuasaan yang dipercayakan kepadanya.

Contoh dari tindakan korupsi :

a. Menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok;
b. Menerima keuntungan (contohnya uang, hadiah, keramah-tamahan) yang bertentangan dengan tanggung jawab jabatan;
c. Menggunakan anggaran, harta, jasa pelayanan dan informasi perusahaan dan anak perusahaan untuk aktivitas diluar kedinasan;
d. Menerima keuntungan (dalam bentuk apapun) dari siapapun selain dari gaji dan tunjangan yang berhak mereka terima.

2. Corruption

It is an act of Pelindo People that improperly and illegally enriches or enriches those who have a “special relationship”, by abusing positions and powers.

Example of corruption act:

a. Abusing power for personal or group interests;
b. Receiving benefits (eg money, gifts, hospitality) contrary to the responsibilities of his/her position;
c. Using budgets, assets, services and information of the Company and subsidiaries for activities outside the service;
d. Receive benefits (in any form) from anyone other than salary and benefits that they are entitled to receive.

3. Pencurian

Kegiatan/tindakan mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (KUHP Pasal 362).

Contoh dari tindakan pencurian:

a. Mengambil hak milik orang lain tanpa persetujuan dari pemilik tersebut;
b. Menggunakan identitas diri orang lain untuk mendapatkan barang dan pelayanan;
c. Menjual benda-benda dan menyimpan hasil dari penjualan secara rahasia;
d. Menyalahgunakan/mengambil tanpa alasan hak uang/barang/data/ dokumen milik perusahaan dan/atau nasabah di lingkungan kerja.

3. Theft

It is the activity/action to take goods, wholly or partly belongs to another person, with the intent to possess unlawfully (KUHP Article 362).

Example of theft:

a. Taking the property of other person without the owner’s consent;
b. Using the identity of others to get goods and services;
c. Selling goods and keeping the proceeds from the sale in secret;
d. Abusing/taking without any reason in the form of money/goods/data/documents owned by the Company in the workplace.

4. Pelanggaran Kebijakan dan Peraturan Perusahaan

Kegiatan/tindakan yang dilakukan oleh Insan Pelindo baik disengaja maupun terencana yang bertentangan dengan kebijakan dan peraturan internal Perusahaan dan Anak Perusahaan. Pelaku pelanggaran ini dapat diancam sanksi menurut ketentuan yang berlaku, baik internal maupun eksternal.

4. Violations of Company Policies and Regulations

Activities/actions carried out by Pelindo People, whether intentional or planned, are contrary to the internal policies and regulations of the Company and its Subsidiaries. Perpetrators of this violation can be threatened with sanctions according to applicable regulations, both internal or external.

Contoh dari tindakan pelanggaran kebijakan dan peraturan perusahaan:

a. Menjalankan tugas diluar prosedur dan instruksi yang telah ditetapkan;
b. Membocorkan informasi perusahaan, seperti: mengenai anggaran, penawaran dari pemasok, strategi bisnis dan lain sebagainya kepada orang-orang yang tidak berhak di luar kewenangannya;
c. Membuat dan/atau menggunakan dan/atau memberikan dan/atau mengubah dan/atau menyalin dan/atau menggandakan data dan/atau keterangan yang tidak sesuai dengan sebenarnya sehingga merugikan perusahaan dan/atau nasabah dan/atau investor/calon investor;
d. Pemberian fasilitas kredit atau perpanjangan waktu pembayaran kewajiban kepada pelanggan atau vendor/supplier yang terindikasi melanggar ketentuan dan berpotensi merugikan Perusahaan dan Anak Perusahaan secara ekonomis;
e. Pelanggaran Norma & Etika (Kode Etik) dengan tindakan diantaranya Perbuatan asusila dilingkungan perseroan, pelecehan, penggunaan narkoba dan terlibat dalam kegiatan masyarakat yang di larang.

Example of violation of Company policies and regulations:

a. Carry out the tasks other than the established procedures and instructions;
b. Leaking corporate information, such as: about the budget, supply from suppliers, business strategies and so on to unauthorized people.
c. Creating and/or using and/or providing and/or changing and/or copying and/or duplicating data and/or information that are not in accordance with the truth, detrimental to the Company and/or customers and/or investors/potential investors;
d. Provision of credit facilities and extension of obligation payments to customers or vendors/suppliers indicated to violate the provisions and potentially harm the Company and Subsidiaries in an economic manner.
e. Violation of Code of Conduct with actions including immoral acts within the Company, harassment, drug use and involvement in prohibited community activities.

5. Benturan Kepentingan

Sebuah situasi dan kondisi dimana Insan Pelindo atau Pemegang Saham karena kedudukan atau jabatan di Perusahaan dan Anak Perusahaan memiliki wewenang yang berpotensi disalahgunakan baik sengaja maupun tidak sengaja untuk kepentingan pribadinya sehingga menimbulkan adanya pertentangan antara kepentingan pribadi dan/atau kelompok dan/atau keluarga dengan kepentingan ekonomis Perusahaan dan Anak Perusahaan.

Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kualitas keputusan atas tugas yang diamanatkan kepadanya, sehingga kinerja hasil keputusan tersebut dapat merugikan Perusahaan dan Anak Perusahaan.

Contoh dari tindakan Benturan Kepentingan :

a. Menerima hadiah dalam bentuk uang atau hiburan dari vendor atau supplier;
b. Menerima bantuan finansial atau non-finansial dari vendor atau supplier;
c. Di mana seseorang atau pasangannya melakukan tindakan yang memiliki kepentingan yang berbenturan dengan kegiatan bisnis di perusahaan;
d. Pemberian keputusan penunjukan pihak tertentu sebagai penyedia barang/jasa, dimana insan Pelindo tersebut mempunyai kepentingan ekonomis pada pihak yang ditunjuk tersebut.

5. Conflict of Interest

A situation in which Pelindo People or the Shareholder due to the position in the Company has the authority that is potentially misused either intentionally or unintentionally for his or her personal interest, resulting in a conflict between personal interests and/or groups and/or families with the economic interests of the Company.

Such condition can affect the quality of decision on the tasks assigned, so that the performance of the decision results can be detrimental to the Company and its Subsidiaries.

Example of Conflict of Interest:

a. Receive prizes in the form of money or entertainment from vendors or suppliers;
b. Receive financial or non-financial assistance from vendors or suppliers;
c. A person or his/her spouse performs actions that have conflict of interests with business activities in the Company;
d. Decide the appointment of a certain party as a provider of goods/services, in which Pelindo people have an economic interest in the appointed party.

6. Penyuapan / Gratifikasi

Suatu tindakan/kegiatan yang dilakukan secara sengaja dan sadar menerima sesuatu atau janji, sedangkan dia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya dia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum (Pasal 3 UU No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap).

Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. (Pasal 128 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Untuk informasi lebih lanjut terkait Penyuapan/Gratifikasi terdapat di dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Contoh dari tindakan penyuapan / gratifikasi :

a. Menerima imbalan secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk apapun dari pihak manapun yang terkait dengan suatu transaksi bisnis perusahaan;
b. Menerima keuntungan-keuntungan dalam bentuk apapun yang mempengaruhi penilaian atau keputusan bisnis perusahaan yang akan diambil.

7. Penipuan

Kegiatan/tindakan yang dilakukan secara sengaja dan sadar dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang (KUHP Pasal 378).

Contoh dari tindakan Penipuan :

a. Suatu tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak sehingga menyebabkan pihak lain menandatangani kontrak tersebut, padahal tanpa tipu muslihat tersebut pihak lain itu tidak akan menandatangani kontrak yang bersangkutan;
b. Dengan sengaja memberikan produk yang dalam kondisi rusak yang mengakibatkan kerugian dalam bentuk finansial;
c. Bekerja sendiri ataupun bekerjasama dengan pihak lain untuk menipu atasan atau Perusahaan dengan menggunakan tanda tangan palsu atau faktur palsu.

6. Bribery/Gratification

A deliberate and conscious act of accepting something or a promise, while he or she knows or can reasonably expect that the giving of something or a promise is meant for he or she to do something or to do anything in his or her duties, which is contrary to his or her authority or obligation in the public interest (Article 3 of Law No. 11 of 1980 concerning the Crime of Bribery).

In a broad sense, giving includes the provision of money, goods, rebates, commissions, interest-free loans, travel tickets, lodging facilities, tourist trips, free medical treatment, and other facilities. (Article 128 of Law No. 20 of 2001 on Amendment to Law No. 31 of 1999 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption. For further information regarding Bribery/Gratification, please refer to the PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Gratification Control Guidelines.

Example of bribery/gratification:

a. Receive direct or indirect benefits in any form from any party related to a Company business transaction;
b. Receive benefits in any form that affect the assessment or business decisions to be taken.

7. Embezzlement

A deliberate and conscious act with the intent to unlawfully benefit oneself or others, by using a false name or false prestige, by deception, or a series of lies, to incite other people to hand over something to them, or to give debt or write off receivables (KUHP Article 378).

Example of Embezzlement:

a. A ruse used by a party to cause the other party to sign the contract, even though without this ruse the other party would not have signed the contract concerned;
b. Deliberately providing products that are in a damaged condition resulting in financial losses;
c. Working alone or in collaboration with other parties to deceive superiors or the Company by using fake signatures or fake invoices.

8. Pemerasan

Kegiatan/tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang (KUHP Pasal 368).

Contoh dari tindakan Pemerasan :

a. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pribadi/golongan/pihak lain;
b. Meminta sejumlah uang atau hadiah kepada calon supplier sebagai pengganti untuk sebuah pekerjaan;
c. Meminta sejumlah uang atau hadiah kepada pelanggan sebagai pengganti untuk sebuah pelayanan istimewa/khusus.

9. Penggelapan

Tindakan/kegiatan yang dilakukan dengan sengaja dan secara sadar melawan hukum untuk memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang saat ini ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. (KUHP Pasal 372).

Contoh dari tindakan Penggelapan:

a. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah milik perusahaan, yang dalam kekuasaannya baik karena jabatannya maupun bukan karena jabatannya.
b. Melakukan tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/ harta perusahaan tanpa sepengetahuan perusahaan dengan tujuan untuk memiliki, menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain.

PENGELOLA LAPORAN PELANGGARAN

Pedoman kerja Komite Pelindo Bersih mengacu pada Peraturan Direksi Nomor SK.01.01/13/12/3/TKPT/UTMA/PLND-23 tanggal 13 Desember 2023 tentang Pedoman *Whistleblowing System* PT Pelabuhan Indonesia (Persero). PT Pelabuhan Indonesia (Persero) bersama pihak ketiga selaku mitra dalam penerapan sistem WBS telah menerima dan memonitor pengaduan baik internal dan eksternal serta membuat laporan bulanan kepada Tim Pelindo Bersih sebagai counterpart yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: SK.01.01/25/7/1/TKPT/UTMA/PLND-23 tanggal 25 Juli 2023 tentang Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pelindo Bersih Dalam Pelaksanaan *Whistleblowing System* PT Pelabuhan Indonesia (Persero), yang beranggotakan:

8. Fraud

A deliberate and conscious act that is intended to benefit themselves or others unlawfully, using false identity or false dignity, with tricks, or lies, moving others to surrender something to them, or to give debt or write off accounts receivable (KUHP Article 368).

Example of Fraud:

a. Performing illegal levies in any form in carrying out their duties for the interests of personal/group/other party;
b. Requesting a sum of money or a gift from potential supplier as a substitute for a job;
c. Requesting a certain amount of money or a gift from a customer in exchange for a special service.

9. Extortion

A deliberate and conscious unlawful act to possess goods that are wholly or partly owned by another person, which is currently under their control, not because of a crime. (KUHP Article 372).

Example of Exortion:

a. Deliberately and unlawfully owns an object which is wholly or partly owned by the Company, which is under his/her control either because of his/her position or not because of his/her position.
b. Performing dishonest actions by hiding Company goods/assets without the Company's knowledge with the aim of possessing, controlling, or using them for other purposes.

WHISTLEBLOWING MANAGEMENT

Pelindo Bersih Committee work guidelines refer to the Board of Directors Regulation Number SK.01.01/13/12/3/TKPT/UTMA/PLND-23 dated December 13, 2023 concerning Guidelines for PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Whistleblowing System. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) together with third parties as partners in the implementation of WBS system have received and monitored both internal and external complaints and made monthly reports to Pelindo Bersih Team as a counterpart as regulated in the Board of Directors Decree Number: SK.01.01/25/7/1/TKPT/UTMA/PLND-23 dated July 25, 2023 concerning Duties and Responsibilities of Pelindo Bersih Committee in the Implementation of Whistleblowing System of PT Pelabuhan Indonesia (Persero), which consists of:

NO	Unit Kerja Work Unit	Jabatan Dalam Tim Position In The Team
1	*Group Head* Manajemen Risiko, Tata Kelola, dan Kepatuhan Group Head of Risk Management, Governance and Compliance	Ketua (Merangkap Anggota) Chairman (Concurrent Member)
2	*Group Head* Satuan Pengawasan Intern Group Head of Internal Audit	Wakil Ketua (Merangkap Anggota) Vice Chairman (Concurrent Member)
3	*Department Head* Tata Kelola dan Kepatuhan Department Head of Governance and Compliance	Sekretaris (Merangkap Anggota) Secretary (Concurrent Member)
4	*Group Head* Sekretariat Perusahaan Group Head Corporate Secretariat	Anggota Member
5	*Group Head* Hukum Group Head of Legal	Anggota Member
6	*Group Head* Layanan SDM Group Head of HC Services	Anggota Member
7	*Group Head* Pelayanan Terminal Group Head of Terminal Services	Anggota Member

SOSIALISASI WHISTLEBLOWING SYSTEM

Sepanjang tahun 2025 telah dilakukan sosialisasi terkait perangkat Peraturan Direksi tentang *Whistleblowing System* (WBS) dalam bentuk penyampaian artikel, infografis, sosialisasi tatap muka, poster, flyer, banner, dan media sosialisasi lainnya termasuk pelaksanaan survey internal terhadap jaminan perlindungan saksi/pelapor dalam penggunaan WBS sebagai salah satu unsur yang mendukung efektifitas penggunaan WBS itu sendiri.

Sosialisasi Tatap Muka terkait GCG, WBS, Kode Etik, Gratifikasi, Kepatuhan yang dilakukan pada:

1. Tanggal 7 Maret 2025 sosialisasi antisipasi risiko fraud melalui media Zoom.
2. Tanggal 17 September 2025 di PT Pelindo Terminal Petikemas Surabaya.
3. Tanggal 18 September 2025 sosialisasi WBS dan GCG Ethical Practices at Pelindo (Zoom) oleh Indonesia Port English Community (IPEC) Business.
4. Tanggal 2 Oktober 2025 sosialisasi WBS pengendalian gratifikasi dan SMAP melalui Zoom oleh PT Pelabuhan Tanjung Priok.
5. Tanggal 12 November 2025 di acara CEO & Executive Talks GRC And Leadership Award 2025 Jakarta.
6. Tanggal 22 Desember 2025 di acara Hari Anti Korupsi Sedunia oleh PT Indonesia Kendaraan Terminal, Tbk (IPCC).

JUMLAH PENGADUAN DAN TINDAK LANJUT PROSES PENGADUAN DI TAHUN 2025

Jumlah Pengaduan yang diterima sepanjang tahun 2025 terdapat 828 aduan yang terdiri dari:

1. Indikasi pelanggaran terdapat 23 aduan pelanggaran (2 pelanggaran carry over dari tahun 2024 dan 21 Pelanggaran yang terjadi ditahun 2025)
2. Indikasi diluar cakupan sebanyak 805 aduan.

WHISTLEBLOWING SYSTEM SOCIALIZATION

Throughout 2025, socialization regarding the Board of Directors' Regulation on the Whistleblowing System (WBS) was conducted through articles, infographics, face-to-face socializations, posters, flyers, banners, and other socialization media. This included conducting an internal survey to ensure the protection of witnesses/whistleblowers in the use of the WBS, as one of the elements supporting its effectiveness.

Face-to-face socializations related to GCG, WBS, Code of Conduct, Gratuities, and Compliance were conducted on:

1. March 7, 2025, socialization on fraud risk anticipation via Zoom.
2. September 17, 2025, at PT Pelindo Terminal Petikemas Surabaya.
3. September 18, 2025, socialization of the WBS and GCG Ethical Practices at Pelindo (Zoom) by the Indonesia Port English Community (IPEC) Business.
4. On October 2, 2025, PT Pelabuhan Tanjung Priok held a socialization of the WBS for gratification control and SMAP via Zoom.
5. On November 12, 2025, at the CEO & Executive Talks GRC and Leadership Award 2025 event in Jakarta.
6. On December 22, 2025, at the International Anti-Corruption Day event held by PT Indonesia Kendaraan Terminal, Tbk (IPCC).

NUMBER OF COMPLAINTS AND FOLLOW-UP ON THE COMPLAINT PROCESS IN 2025

The total number of complaints received throughout 2025 was 828, consisting of:

1. 23 complaints of violations (2 violations carried over from 2024 and 21 violations that occurred in 2025).
2. 805 complaints of indications outside the scope of the report.

Jenis Pelanggaran Type of Violation	**Jan** Jan	**Feb** Feb	**Mar** Mar	**Apr** Apr	**Mei** May	**Jun** Jun	**Jul** Jul	**Ags** Ags	**Sep** Sep	**Okt** Oct	**Nov** Nov	**Des** Dec	**Total**
Indikasi Pelanggaran *A. Indications of Violations*	2	3	2	5	-	1	1	1	2	5	-	1	23
Tindakan Curang *Fraudulent Acts*	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Korupsi *Corruption*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pencurian *Theft*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelanggaran Kebijakan Perusahaan *Violation of Company Policy*	-	2	2	2	-	-	1	-	2	5	-	-	14
Benturan Kepentingan *Conflict of Interest*	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
Penyuapan *Bribery*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penggelapan *Embezzlement*	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
Penipuan *Fraud*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemerasan *Extortion*	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Di Luar Cakupan *B. Out of Scope*	64	70	65	66	61	53	51	81	101	75	52	66	805
Total A + B	66	73	67	71	61	54	52	82	103	80	52	67	828

Sepanjang Tahun 2025 seluruh laporan pengaduan sudah dapat ditindaklanjuti dengan persentase rata-rata tindak lanjut Penyelesaian untuk yaitu 81% seperti berikut:

Throughout 2025, all complaint reports have been followed up with an average percentage of follow-up resolution of 81% as follows:

No	**Indikasi Pelanggaran** Indications of Violations	**Jumlah Temuan** Number of Findings	**Status Tindak Lanjut Penyelesaian** Status of Follow-up Resolution			**Keterangan** Description
			Selesai Completed	**Tindak Lanjut** Follow-up	**Belum Tindak Lanjut** No Follow-up	
1	Tindakan Curang *Fraudulent Acts*	1	-	1	-	
2	Korupsi *Corruption*	-	-	-	-	
3	Pencurian *Theft*	-	-	-	-	
4	Benturan Kepentingan *Conflict of Interest*	2	-	2	-	
5	Penyuapan *Bribery*	-	-	-	-	

No	Indikasi Pelanggaran Indications of Violations	Jumlah Temuan Number of Findings	Status Tindak Lanjut Penyelesaian Status of Follow-up Resolution			Keterangan Description
			Selesai Completed	Tindak Lanjut Follow-up	Belum Tindak Lanjut No Follow-up	
6	Penggelapan *Embezzlement*	2	1	1	-	Dengan hukuman penurunan jabatan dan tidak diperpanjang kontrak kerja *With the punishment of demotion and non-renewal of the employment contract*
7	Penipuan *Fraud*	-	-	-	-	
8	Pemerasan *Extortion*	4	4	-	-	Dengan hukuman pemecatan, Pemberian Surat Peringatan ke II dan telah dilaksanakan perbaikan untuk sarana umum *With the punishment of dismissal, issuance of a second warning letter and improvements to public facilities have been implemented*
9	Pelanggaran Kebijakan Perusahaan *Violation of Company Policy*	14	8	6	-	Tidak terbuktinya aduan, menerima sanksi B1 dan perdamaian dengan pelapor *The complaint was not proven, received a B1 sanction and made a settlement with the complainant*

PROGRAM ANTI KORUPSI

Program Anti Korupsi Perseroan diatur dalam kode etik, pedoman *Whistleblowing System*, pedoman gratifikasi Perseroan, disampaikan pula pada perdir benturan kepentingan, anti fraud dan budaya SMAP. Pelindo berkomitmen menciptakan praktik bisnis yang bersih dan menjauhi segala bentuk kecurangan (*Fraud*). Komitmen Perseroan diperkuat dengan dibentuknya sistem *Whistleblowing System* yaitu sistem yang disediakan oleh Pelindo bagi seluruh *stakeholders.*

Pelindo melarang segala bentuk korupsi dan suap. Korupsi (*Corruption*), merupakan tindakan yang melawan hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain atau badan lain yang merugikan atau perekonomian Negara. Penyuapan dapat diartikan sebagai pemberian atau penerimaan segala bentuk penawaran, komitmen, uang, hadiah, hiburan, atau barang berharga yang tidak sesuai dengan etika, yang diberikan atau diterima dengan tujuan favoritisme, mempengaruhi, mengubah keputusan, melanggar perjanjian kerja, memberikan keuntungan yang tidak pantas dan tidak sesuai etika ketika Insan Pelindo berada dalam kapasitas pekerjaan.

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) mengharapkan semua Insan Pelindo untuk:

1. Tidak memberi atau menerima semua hal yang telah disebutkan di atas dari pihak eksternal seperti pelanggan, pesaing dan vendor;

ANTI-CORRUPTION PROGRAM

The anti-corruption program in the Company's is regulated in the code of conduct, Whistleblowing System guidelines and the Company's gratification guidelines. Pelindo is committed to creating clean business practices and avoiding all forms of fraud. The Company's commitment is strengthened by the establishment of Whistleblowing System, which is a system provided by Pelindo for all stakeholders.

Pelindo prohibits all forms of corruption and bribery. Corruption, is an act against the law, enriching oneself, other people or other entities that harm or the economy of the State. Bribery can be defined as the giving or receiving of any form of offer, commitment, money, gift, entertainment, or valuable goods that are not in accordance with ethics, which are given or received with the aim of favoritism, influencing, changing decisions, violating employment agreements, providing inappropriate and unethical benefits when Pelindo People are in a work capacity.

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) expects all Pelindo people to:

1. Not give or receive any of the above from external parties such as customers, competitors and vendors;

2. Apabila terdapat pihak eksternal yang memberikan penawaran atau mencoba untuk melakukan hal serupa, Insan Pelindo perlu melaporkannya kepada atasan untuk menentukan tindakan yang pantas dilakukan dan/atau Tim UPG.

2. If there are external parties who make offers or try to do the same, Pelindo People need to report it to their superiors to determine the appropriate action and/or the UPG Team.

Perseroan memiliki dokumen yang digunakan sebagai acuan dalam mengatasi praktik korupsi, antara lain:

The Company has documents that are used as a reference in addressing corrupt practices, including:

No	Nomor Dokumen Document Number	Judul Dokumen Document Title	Versi Ke Version No.	Tanggal Terbit Publication Date
1	MRTK/PI0/PD.03.00.00/01-2025	Penilaian GCG/& Assessment &/ Self Assessment GCG *GCG Assessment/& GCG Self-Assessment*	01	14/01/2025
2	MRTK/PI0/PD.04.00.00/01-2025	Pengelolaan Gratifikasi *Gratification Management*	01	15/01/2025
3	MRTK/PI0/PD.05.00.00/01-2025	Pengelolaan Whistleblowing System *Whistleblowing System Management*	01	15/01/2025
4	MRTK/PI0/PD.06.00.00/00-2025	Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan *Anti-Bribery Management System Implementation*	00	15/01/2025
5	SKPR/PI0/PD.13.00.00/01-2025	Pembaharuan Dokumen GCG *GCG Document Updates*	01	20/05/2025

PROGRAM DAN PROSEDUR YANG DILAKUKAN DALAM MENGATASI PRAKTIK KORUPSI

SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN

Dewan Komisaris dan Direksi berkomitmen untuk menetapkan kebijakan anti penyuapan dalam menjalankan kegiatan usahanya yang bersih dari praktik suap dan korupsi dengan menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016. Salah satu implementasi SMAP yang dilakukan oleh Pelindo adalah, perusahaan melakukan audit sertifikasi ISO 37001:2016 yang dilakukan oleh PT British Standard Institute (BSI) Group Indonesia, dengan hasil sebagai berikut

PROGRAMS AND PROCEDURES UNDERTAKEN TO OVERCOME CORRUPTION PRACTICES

ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM

Board of Commissioners and Board of Directors are committed to establishing anti-bribery policies in carrying out business activities that are clean from bribery and corruption by implementing the ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (SMAP). One of the SMAP implementations carried out by Pelindo is that the Company conducted an ISO 37001: 2016 certification audit conducted by PT British Standard Institute (BSI) Group Indonesia, with the following results

No	Wilayah Kerja Working Area	No Sertifikat Certificate No.	Exp Date
1	Kantor Pusat Head Office	IABMS 791634	6 Juli 2026 July 26, 2026
2	Regional 1 Region 1	IABMS 791631	6 Juli 2026 July 26, 2026
3	Regional 2 Region 2	IABMS 791638	6 Juli 2026 July 26, 2026
4	Regional 3 Region 3	IABMS 791641	6 Juli 2026 July 26, 2026
5	Regional 4 Region 2	IABMS 791643	6 Juli 2026 July 26, 2026

Komitmen penerapan kebijakan anti penyuapan telah ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi serta di sosialisasikan ke seluruh wilayah Pelindo Group.

The commitment to implement the anti-bribery policy has been signed by Board of Commissioners and Board of Directors and socialized to all areas of Pelindo Group.

Danantara Indonesia

PELINDO

KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN
PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) sebagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang Jasa Kepelabuhan menetapkan Kebijakan untuk menjalankan kegiatan usahanya yang bersih dari praktik suap dan korupsi dengan menerapkan budaya 5 No's SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuapan) yaitu *No Gift, No Kickback, No Bribery, No Corruption, No Luxurious Hospitality.*

Dalam rangka mendukung kebijakan tersebut, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) berkomitmen untuk:

1. Melarang tindakan suap dan korupsi sesuai tujuan organisasi;
2. Menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan, meninjau, dan mencapai sasaran anti penyuapan;
3. Mematuhi segala bentuk peraturan perundang-undangan tentang suap dan korupsi yang berlaku di wilayah Republik Indonesia;
4. Mendorong peningkatan kepedulian anti penyuapan di lingkungan perusahaan dengan itikad baik dan atau atas dasar keyakinan yang wajar;
5. Menetapkan kewenangan dan kemandirian Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan;
6. Memenuhi persyaratan-persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan melakukan peningkatan secara berkelanjutan;
7. Menjaga kerahasiaan dan melindungi pelapor tindakan penyuapan dari tindakan balasan karena kepeduliannya pada Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
8. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan anti penyuapan.

Konsekuensi tidak dipatuhinya kebijakan ini dapat mengakibatkan tindakan serius berupa sanksi disipliner pemutusan hubungan kerja, sanksi perdata dan/atau sanksi pidana.

Jajaran Komisaris

Jajaran Direksi

www.pelindo.co.id @pelindo Pelindo_official @indonesiaport Pelabuhan Indonesia

Budaya anti penyuapan dilakukan dengan menerapkan zero tolerance terhadap penyuapan yang dilakukan oleh setiap Insan Pelindo. Zero tolerance terhadap penyuapan salah satunya dilakukan dengan Menjunjung tinggi nilai integrasi dan berpegang teguh pada Peraturan Perusahaan serta prinsip 5No's, yaitu:

1. *No Bribery* (Tidak boleh ada suap menyuap);
2. *No Kickback* (Tidak boleh ada komisi, tanda terima kasih baik dalam bentuk uang dan dalam bentuk lainnya);
3. *No Gift* (Tidak boleh ada hadiah atau gratifikasi yang bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku);
4. *No Luxurious Hospitality* (Tidak boleh ada penyambutan dan jamuan yang berlebihan);
5. *No Corruption* (Tidak boleh melakukan korupsi untuk memperkaya diri sendiri atau korporasi baik secara sadar maupun tidak disadari).

Perusahaan tidak akan melakukan toleransi atas segala bentuk tindakan pelanggaran gratifikasi dan suap.

Anti-bribery culture is carried out by applying zero tolerance to bribery committed by every Pelindo People. Zero tolerance for bribery is carried out by upholding the value of integration and adhering to Company Regulations and the 5No's principle, namely:

1. No Bribery (There should be no bribery);
2. No Kickback (No commissions, gratuities in the form of money and other forms);
3. No Gift (There should be no gifts or gratuities that are contrary to the applicable rules and regulations);
4. No Luxurious Hospitality (No excessive welcoming and hospitality);
5. No Corruption (No corruption to enrich oneself or the corporation either consciously or unconsciously).

The Company will not tolerate all forms of gratification and bribery violations.

PENGUKURAN EFEKTIVITAS PENGENDALIAN KORUPSI (EPK)

Perseroan melaksanakan Pengukuran Efektivitas Pengendalian Korupsi (EPK) Badan Usaha pada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI di tanggal 1 Desember - 19 Desember 2025.

Dalam pelaksanaan pengukuran Efektivitas Pengendalian Korupsi, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) memperoleh Skor 82,78% dengan Predikat "Berubah" menunjukkan bahwa risiko korupsi telah cukup terkelola dengan kebijakan dan prosedur cegah-deteksi-respons secara umum sudah berjalan, menjangkau kegiatan utama, dan cukup konsisten. Pegawai sudah mulai berpartisipasi dalam sistem pencegahan dan deteksi korupsi. Komitmen anti korupsi sudah ditunjukkan dalam pernyataan kebijakan dan SOP pencegahan, pendetksian, dan penangana kejadian. Instrumen pengukuran efektivitas pengendalian korupsi di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) berdasarkan indikator dari tiga pilar sebagai berikut:

MEASUREMENT OF CORRUPTION CONTROL EFFECTIVENESS (EPK)

The Company conducted a Business Corruption Control Effectiveness Measurement (EPK) at PT Pelabuhan Indonesia (Persero), carried out by the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) of the Republic of Indonesia from December 1 to December 19, 2025.

In the Corruption Control Effectiveness Measurement, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) achieved a score of 82.78% with the predicate "Evolving," indicating that corruption risks have been reasonably well managed, with prevention–detection–response policies and procedures generally functioning, covering key activities, and being fairly consistent. Employees have begun to actively participate in corruption prevention and detection systems. Anti-corruption commitment has been demonstrated through policy statements and SOPs on prevention, detection, and handling of incidents. The measurement instruments for corruption control effectiveness within PT Pelabuhan Indonesia (Persero) are based on indicators from the following three pillars:

No	Pilar Pillar	Bobot Weight	Skor Score	Nilai Value
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(4)
I	Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi Corruption Risk Management Capability	36.00%	88,06%	32,56%
II	Penerapan Strategi Pencegahan Implementation of Prevention Strategies	48.00%	83,67%	38,88%
III	Penanganan Kejadian Korupsi Handling of Corruption Incidents	16.00%	70,83%	11,33%
	Total	**100%**		**82,78%**

No	Pilar Pillar	Bobot Weight	Skor Score	Nilai Value
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(4)
	SIMPULAN EFEKTIVITAS CONCLUSION OF EFFECTIVENESS			**Berubah** Evolving

KEBIJAKAN GRATIFIKASI

Pelindo menyadari bahwa dalam menjalin hubungan kerja dengan pihak ketiga, seringkali bersinggungan dengan praktik gratifikasi, sehingga dibutuhkan sebuah pedoman untuk mengendalikan praktik tersebut. Hal ini dilakukan agar seluruh Insan Pelindo memiliki pemahaman yang sama tentang perlakuan terhadap gratifikasi serta membantu Insan Pelindo untuk tidak terjerat dalam praktik gratifikasi yang termasuk tindak pidana suap.

Pengertian Gratifikasi menurut Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 pasal 12B adalah Pemberian dalam arti luas yakni meliputi permberian dan/atau penerimaan hadiah/cinderamata dan hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik yang diberikan atau diterima oleh Insan Pelindo yang terjadi karena berkaitan dengan jabatan/ wewenangnya di Perusahaan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan/atau mempengaruhi independensinya dalam bekerja serta berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No PER-02/MBU/03/2023 Tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara. Berdasarkan aturan baru tersebut, perusahaan melakukan penyesuaian terhadap Pedoman Pengendalian Gratifikasi yang telah ditetapkan pada Peraturan Direksi Nomor HK.01/9/11/3/TKPT/UTMA/PLND-23 tanggal 9 November 2023 tentang Pengendalian Gratifikasi PT Pelabuhan Indonesia (Persero)

PENGELOLAAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Dalam kondisi tertentu, saat insan Pelindo tidak dapat menghindar untuk menerima pemberian dari Pihak Ketiga dengan pemberian tersebut di luar ketentuan atau pemberian tersebut sudah ada di suatu tempat yang dititipkan kepada/melalui orang lain tanpa sepengetahuan Insan Pelindo, maka yang bersangkutan wajib melaporkan baik secara langsung kepada KPK atau melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) sesuai mekanisme yang telah diatur.

Manajemen telah membentuk unit pengelolaan gratifikasi yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor SK.01.01/7/6/2/ TKPT/UTMA/PLND-24 tanggal 7 Juni 2024 tentang Pembentukan Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) yang Sekaligus Sebagai Unit Pengendalian

GRATIFICATION POLICY

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) realizes that in establishing a working relationship with third parties, the practice of gratification is often involved, hence a guideline is needed to control this practice. This aims for all Pelindo People to have the same understanding about the treatment of gratification and assist Pelindo People not to be entangled in gratification practices which is included the crime of bribery.

The definition of gratification according to Law No. 20 of 2001 article 12B is a gift in a broad sense, which includes the giving and/or receipt of gifts/souvenirs and entertainment, both received domestically and abroad and carried out using electronic devices or without electronic devices, given or received by Pelindo People that occur due to their position/authority in the Company, which may cause a conflict of interest and/or affect their independence at work as well as contrary to their obligations or duties.

In order to implement the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-02/MBU/03/2023 dated March 3, 2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises. Based on these new rules, the Company made adjustments to the Gratification Control Guidelines set out in Board of Directors Regulation Number HK.01/9/11/3/TKPT/UTMA/PLND-23 dated November 9, 2023 concerning Gratification Control of PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

GRATIFICATION CONTROL MANAGEMENT

Under certain conditions, when Pelindo people cannot avoid receiving a gift from a Third Party, provided that the gift is other than the provisions or the gift is already in a place that is entrusted to/through another person without the knowledge of Pelindo people, then the person concerned must report it either directly to KPK or through Gratification Control Unit (GCU) according to the regulated mechanism.

Management has established a gratification management unit as stipulated in the Decree of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) SK.01.01/7/6/2/ TKPT/UTMA/PLND-24 dated June 7, 2024 concerning Establishment of Anti-Bribery Compliance Function Team (FKAP) which is also a Gratification Control Unit

Gratifikasi (UPG), Unit Pengelolaan Benturan Kepentingan dan Fraud Dalam Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Lingkungan PT Pelabuhan Idonesia (Persero), yang terdiri dari:

(UPG), Conflict of Interest and Fraud Management Unit in the Implementation of Anti-Bribery Management System (SMAP) within PT Pelabuhan Indonesia (Persero), consisting of:

NO	Unit Kerja Work Unit	Jabatan Dalam Tim Position In The Team
1	*Group Head* Manajemen Risiko, Tata Kelola, dan Kepatuhan Head of Risk Management, Governance and Compliance	Ketua (Sekaligus Anggota) Chairman (Concurrent Member)
2	*Group Head* Satuan Pengawasan Internal Head of the Internal Audit Unit	Wakil Ketua (Sekaligus Anggota) Vice Chairman (Concurrent Member)
3	*Department Head* Tata Kelola dan Kepatuhan Head of the Governance and Compliance Departmen	Sekretaris (Sekaligus Anggota) Secretary (Concurrent Member)
4	*Group Head* Sekretariat Perusahaan Head of the Corporate Secretariat	Anggota Member
5	*Group Head* Hukum Head of Legal	Anggota Member
6	*Group Head* Layanan SDM Head of HR Services	Anggota Member
7	*Group Head* K3 dan Sistem Manajemen Head of Health, Safety and Environment and Management Systems	Anggota Member
8	*Executive Director*	Penanggung Jawab TIM FKAP sekaligus TIM UPG - Regional Head of the FKAP Team and the UPG Team – Regional
9	*Division Head* Pelayanan SDM dan Umum Regional 1, 2, 3, dan 4 Head of the Human Resources and General Services Division for Regions 1, 2, 3, and 4	Anggota TIM FKAP sekaligus TIM UPG - Regional Member of the FKAP Team and the UPG Team – Regional
10	*Division Head* Teknik Regional 1, 2, 3 dan 4 Head of Engineering for Regions 1, 2, 3 and 4	Anggota TIM FKAP sekaligus TIM UPG - Regional Member of the FKAP Team and the UPG Team – Regional
11	*General Manager*/CEO Sub Regional	Penanggung Jawab TIM FKAP sekaligus TIM UPG - Cabang/ Sub Regional Head of the FKAP Team and the UPG Team – Branch/Sub-region
12	Unit Pengelola Layanan SDM dan Umum Human Resources and General Services Unit	Anggota TIM FKAP sekaligus TIM UPG - Cabang/Sub Regional Member of the FKAP Team and the UPG Team – Branch/Sub-regional
13	Unit Pengelola Sistem Manajemen Management System Unit Anggota TIM FKAP sekaligus TIM UPG - Cabang/Sub Regional Member of the FKAP Team and the UPG Team – Branch/Sub-regional	Anggota TIM FKAP sekaligus TIM UPG - Cabang/Sub Regional Member of the FKAP Team and the UPG Team – Branch/Sub-regional

Tugas dan Tanggung Jawab Unit Pengendalian Gratifikasi

1. Tim UPG Kantor Pusat:
   a. Melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
   b. Melakukan koordinasi dengan unit atau bagian terkait implementasi dan efektivitas pengendalian gratifikasi;
   c. Me*review* dan memperbaharui kebijakan pengelolaan, pembentukan lingkungan anti gratifikasi dan pencegahan korupsi di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
   d. Menerima laporan, merekap dan melaporkan gratifikasi dari pihak internal PT Pelabuhan Indonesia (Persero) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
   e. Menyimpan barang gratifikasi sampai dengan ditetapkannya status barang gratifikasi oleh KPK;
   f. Menindaklanjuti hasil rekomendasi KPK atas penetapan status barang gratikasi;
   g. Berkoordinasi dengan tim KPK terkait dengan pelaksanaan gratifikasi di lingkungan kerja PT Pelabuhan Indonesia (Persero); dan

Gratification Control Unit Duties and Responsibilities

1. Head Office GCU Team:
   a. Conducting socialization of gratification control within PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
   b. Coordinate with units or sections related to the implementation and effectiveness of gratification control;
   c. Reviewing and updating management policies, establishing an anti-gratification environment and preventing corruption within PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
   d. Receive reports, recapitulate and report gratuities from internal parties of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) to the Corruption Eradication Commission;
   e. Storing the goods of gratification until the status of the goods is determined by KPK;
   f. Following up on the results of KPK's recommendation on the determination of the status of goods of gratification;
   g. Coordinate with KPK team related to the implementation of gratification in working environment of PT Pelabuhan Indonesia (Persero); and

h. Berkoordinasi dengan Tim UPG Regional, Cabang, Holding, Anak Perusahaan, Perusahaan Afiliasi dan *Other Business Portfolio* terkait Pengendalian Gratifikasi di lingkungan kerja PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

2. Tim UPG Regional:
   a. Para Regional Head menjadi penanggung jawab di wilayah kerjanya dan melakukan koordinasi dengan Group Head Sekretariat Perusahaan dalam hal pengelolaan gratifikasi di wilayah regional masing-masing;
   b. Melakukan sosialisasi pengendalian gratiikasi di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) berkoordinasi dengan Tim UPG Kantor Pusat;
   c. Menerima laporan, merekap dan melaporkan gratifikasi dari pihak internal PT Pelabuhan Indonesia (Persero) kepada Tim UPG Kantor Pusat;
   d. Menyimpan barang gratifikasi sampai dengan ditetapkannya status barang gratifikasi oleh KPK dan melaporkannya ke Tim UPG Kantor Pusat.

3. Tim UPG Cabang:
   a. Para General Manager cabang menjadi penanggung jawab di wilayah kerjanya dan melakukan koordinasi dengan Regional Head dan Kantor Pusat dalam hal pengelolaan gratifikasi di wilayah regional masing-masing;
   b. Melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) berkoordinasi dengan Tim UPG Regional;
   c. Menerima laporan, merekap dan melaporkan gratifikasi dari pihak internal PT Pelabuhan Indonesia (Persero) kepada Tim UPG Kantor Pusat dan tembusan kepada Regional Head;
   d. Menyimpan barang gratifikasi sampai dengan ditetapkannya status barang gratifikasi oleh KPK dan melaporkannya ke Tim UPG Kantor Pusat tembusan kepada Regional Head.

h. Coordinate with the Regional GCU Team, Branches, Holding, Subsidiaries, Affiliated Companies and Other Business Portfolios related to Gratification Control in working environment of PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

2. Regional GCU Team:
   a. Regional Heads are responsible for their working areas and coordinate with the Group Head Corporate Secretariat in terms of gratification management in their respective regional areas;
   b. Conducting socialization of gratification control within PT Pelabuhan Indonesia (Persero) in coordination with the Head Office GCU Team;
   c. Receive reports, recapitulate and report gratuities from internal parties of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) to the Head Office GCU Team;
   d. Storing the goods of gratification until the status of the goods is determined by the KPK and reporting it to the Head Office GCU Team.

3. Branch GCU Team:
   a. Branch General Managers are responsible for their working areas and coordinate with Regional Heads and Head Office in terms of gratification management in their respective regional areas;
   b. Conducting socialization of gratification control within PT Pelabuhan Indonesia (Persero) in coordination with the Regional GCU Team;
   c. Receive reports, recapitulate and report gratuities from internal parties of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) to the Head Office GCU Team and a copy to the Regional Head;
   d. Storing the goods of gratification until the status of the goods is determined by KPK and reporting it to the Head Office GCU Team with a copy to the Regional Head.

Mekanisme Pelaporan
Reporting Mechanism

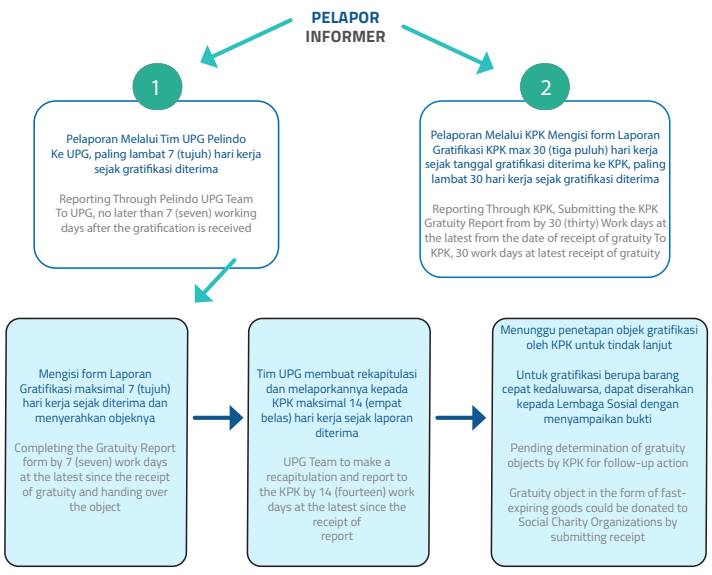

diatur Perusahaan, maka Insan Pelindo yang bersangkutan wajib melaporkan dengan tata cara sebagai berikut:

1. Saluran Pelaporan Gratifikasi, jika Insan Pelindo menerima barang Gratifikasi:

   a. Pelaporan Melalui KPK
      Laporan Gratifikasi disampaikan secara online melalui aplikasi Gratifikasi Online (GOL). Laporan Gratifikasi akan diproses oleh KPK dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak laporan dinyatakan lengkap dan diterima oleh KPK. Untuk informasi lebih lengkap dapat dilihat di https://gol.kpk.go.id/login;
   b. Pelaporan Melalui Tim UPG Perusahaan
      Jika Insan Pelindo menerima baik secara langsung maupun tidak langsung gratifiksi dapat mengisi form Laporan Gratifikasi UPG Perusahaan sebagaimana terlampir, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi diterima dengan menyerahkan objek gratifikasi yang diterima.
2. Tim UPG membuat rekapitulasi Laporan Gratifikasi serta melaporkannya kepada KPK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak laporan Gratifikasi diterima oleh Tim UPG Perusahaan untuk selanjutnya mendapat penetapan status objek Gratifikasi oleh KPK;
3. Untuk penerimaan Gratifikasi yang merupakan barang yang cepat kadaluarsa (misal: makanan dan minuman), maka dapat diserahkan kepada Lembaga Sosial dengan menyampaikan bukti tanda serah terima kepada Tim UPG selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah tanggal penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud, dengan contoh Format sebagaimana diatur dalam Pedoman ini;
4. Untuk penerimaan Gratifikasi yang merupakan barang seperti Cinderamata/Uang/Makanan yang tidak cepat kadaluarsa, dan sebagainya menunggu penetapan objek Gratifikasi oleh KPK untuk tindak lanjut.
5. Saluran Pelaporan Gratifikasi, jika Insan Pelindo melihat adanya dugaan pelanggaran terkait Gratifikasi:
   Penyampaian laporan gratifikasi juga dapat dilakukan melalui saluran *Whistleblowing System* (Pelindo Bersih) bagi Insan Pelindo yang mengetahui adanya indikasi pelanggaran gratifikasi, sebagaimana yang telah diatur pada Pedoman *Whistleblowing System* PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

In the event of a gratification occurs, as stipulated by the Company, the relevant Pelindo People must report it in the following manner:

1. Gratification Reporting Channel, if Pelindo People receive Gratification goods:
   a. Reporting Through KPK
      The Gratification Report is submitted online through the Online Gratification (GOL) application. The Gratification Report will be processed by KPK within 30 (thirty) working days after the report is declared complete and received by KPK. For more complete information, see https://gol. kpk.go.id/login;
   b. Reporting Through the Company's UPG Team
      If Pelindo People receive gratuities directly or indirectly, they can fill out the Company's UPG Gratification Report form as attached, no later than 7 (seven) working days from the receipt date of the Gratification by submitting the object of gratification received.
2. The UPG Team makes a recapitulation of the Gratification Report and submit a report to KPK no later than 14 (fourteen) working days after the Gratification report is received by the Company's UPG Team for further approval of the status of Gratification object by KPK;
3. For Gratification which is an item that expires quickly (eg food and drink), can be submitted to Social Institutions by submitting proof of handover to the UPG Team no later than 7 (seven) days after the receipt date of the Gratification, using the Format as regulated in these Guidelines;
4. For Gratification in the form of goods such as Souvenirs/ Money/Food that does not expire quickly, and others, is waiting for the determination of the object of Gratification by KPK for follow-up.
5. Gratification Reporting Channel, if Pelindo Personel witnesses an alleged violation related to Gratification: Gratification report can also be submitted through the Whistleblowing System (Pelindo Bersih) channel for Pelindo People who are aware of any indications of gratification violation, as stipulated in PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Whistleblowing System Guidelines.

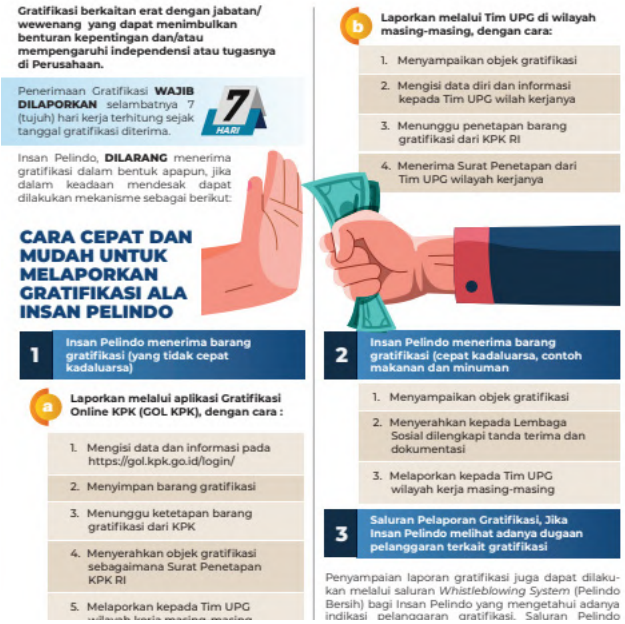

LAPORAN GRATIFIKASI TAHUN 2025

No	Objek Gratifikasi dan Jumlah Object of Gratification and Amount	Jumlah Penerimaan Amount Received	Wilayah Kerja Work Area	Tindak Lanjut Pengelolaan Gratifiaksi Follow-up on Gratification Handling
1	Makanan dan minuman dengan masa berlaku Food and beverages with expiration period	1	Regional 3	Diserahkan sebagai bantuan sosial Submitted as social assistance
2	Makanan dan minuman dengan masa berlaku Food and beverages with expiration period	3	PT PMLI	Diserahkan sebagai bantuan sosial Submitted as social assistance
3	Makanan dan minuman dengan masa berlaku Food and beverages with expiration period	4	PT JAI Tbk	Diserahkan sebagai bantuan sosial Submitted as social assistance
4	Makanan dan minuman dengan masa berlaku Food and beverages with expiration period	1	PT SPTP	Diserahkan sebagai bantuan sosial Submitted as social assistance
5	Makanan dan minuman dengan masa berlaku Food and beverages with expiration period	2	PT TPS	Diserahkan sebagai bantuan sosial Submitted as social assistance
6	Makanan dan minuman dengan masa berlaku Food and beverages with expiration period	6	PT IPC TPK	Diserahkan sebagai bantuan sosial Submitted as social assistance
7	Barang / hadiah pisah sambut Welcome and Farewell gifts	1	PT SPSL	Ditetapkan sebagai milik negara, pelapor bersedia membayar kompensasi Determined as state property, the reporter is willing to pay compensation.
8	Kue dengan nominal taksiran sebesar Rp 100.000 Cakes with an estimated value of Rp 100,000	1	PT PMLI	Dilelang oleh Tim UPG kepada Tim PMLI sebesar Rp 100.000 untuk dibelanjakan jum'at berkah Auctioned by UPG Team to PMLI Team for Rp 100,000 to be spent on Friday Blessings.
9	1 Kotak Kue Merek Dapur Coklat 1 Box of Dapur Coklat Brand Cakes	1	PT PMLI	Diserahkan sebagai bantuan sosial Submitted as social assistance
10	Kue Kering Sebesar Rp 1.350.000 Cookies for Rp 1,350,000	1	PT PDS	Diserahkan sebagai bantuan social Submitted as social assistance

No	Objek Gratifikasi dan Jumlah Object of Gratification and Amount	Jumlah Penerimaan Amount Received	Wilayah Kerja Work Area	Tindak Lanjut Pengelolaan Gratifiaksi Follow-up on Gratification Handling
11	Makanan dan minuman dengan masa berlaku dengan nominal/taksiran Rp 1.850.000 Food and beverages with expiration period and estimated value of Rp 1,850,000	1	PT TTL	Sudah disetorkan kepada Tim UPG Has been submitted to UPG Team
12	Makanan dan minuman dengan masa berlaku dengan nominal/taksiran Rp 1.250.000 Food and beverages with expiration period and estimated value of Rp 1,250,000	1	PT TTL	Sudah disetorkan kepada Tim UPG Has been submitted to UPG Team
13	Makanan dan minuman dengan masa berlaku dengan nominal/taksiran Rp 900.000 Food and beverages with expiration period and estimated value of Rp 900,000	1	PT TTL	Sudah disetorkan kepada Tim UPG Has been submitted to UPG Team
14	Makanan dan minuman dengan masa berlaku dengan nominal/taksiran Rp 1.119.000 Food and beverages with expiration period and estimated value of Rp 1,119,000	1	PT TTL	Sudah disetorkan kepada Tim UPG Has been submitted to UPG Team

PELATIHAN/SOSIALISASI ANTI KORUPSI KEPADA KARYAWAN

Sosialisasi Tatap Muka terkait GCG, WBS, Kode Etik, Gratifikasi, Kepatuhan yang dilakukan pada:

1. Tanggal 7 Maret 2025 sosialisasi antisipasi risiko fraud melalui media Zoom.
2. Tanggal 17 September 2025 di PT Pelindo Terminal Petikemas Surabaya.
3. Tanggal 18 September 2025 sosialisasi WBS dan GCG Ethical Practices at Pelindo (Zoom) oleh Indonesia Port English Community (IPEC) Business.
4. Tanggal 2 Oktober 2025 sosialisasi WBS pengendalian gratifikasi dan SMAP melalui Zoom oleh PT Pelabuhan Tanjung Priok.
5. Tanggal 12 November 2025 di acara CEO & Executive Talks GRC And Leadership Award 2025 Jakarta.
6. Tanggal 22 Desember 2025 di acara Hari Anti Korupsi Sedunia oleh PT Indonesia Kendaraan Terminal, Tbk (IPCC).

ANTI-CORRUPTION TRAINING/SOCIALIZATION FOR EMPLOYEES

Face-to-face socialization sessions related to GCG, WBS, Code of Conduct, Gratuities, and Compliance were held on:

1. March 7, 2025, a socialization on fraud risk anticipation via Zoom.
2. September 17, 2025, at PT Pelindo Terminal Petikemas Surabaya.
3. September 18, 2025, a socialization on WBS and GCG Ethical Practices at Pelindo (Zoom) by the Indonesia Port English Community (IPEC) Business.
4. October 2, 2025, a socialization on WBS on gratuity control and SMAP via Zoom by PT Pelabuhan Tanjung Priok.
5. November 12, 2025, at the CEO & Executive Talks GRC and Leadership Award 2025 Jakarta.
6. On December 22, 2025, PT Indonesia Kendaraan Terminal, Tbk (IPCC) celebrated World Anti-Corruption Day.

Selain itu, Perseroan telah melaksanakan beberapa program yang mendukung pelaksanaan anti korupsi yaitu:

In addition, the Company has carried out several programs to support anti-corruption efforts, including:

No	Nama Program Program Name
1	Kerjasama Antara PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan KPK RI terkait Penanganan Pengaduan dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Collaboration between PT Pelabuhan Indonesia (Persero) and the Corruption Eradication Commission (KPK) regarding Complaint Handling in Corruption Eradication Efforts
2	Penggunaan Single Channel Pelaporan WBS Pelindo Grpup yang dikelola oleh Pihak ketiga secara Obyektif dan Profesional Use of a Single Channel for Reporting Pelindo Group's WBS, managed by a third party, in an Objective and Professional Manner
3	Pembentukan Tim Komite Pelindo Bersih dalam Menjalankan WBS Pelindo Group Whistleblowing System PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Melalui SK. 01.01/25/7/1/TKPT/UTMA/PLND-23 Tgl 25 Juli 2023 Establishment of Pelindo Bersih Committee Team to manage Pelindo Group WBS Whistleblowing System at PT Pelabuhan Indonesia (Persero) through Decree No. 01.01/25/7/1/TKPT/UTMA/PLND-23, July 25, 2023
4	Perolehan Sertifikasi SMAP ISO 37001:2016 Pelindo Kantor Pusat & Regional Obtaining ISO 37001:2016 SMAP Certification for Pelindo Head Office & Regional Offices
5	Sosialisasi Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Socialization of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Anti-Bribery Management System
6	Sosialisasi 5 No's *Socialization of the 5 No's*

PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

Perseroan telah memiliki kebijakan terkait pengelolaan laporan harta kekayaan penyelenggara Negara (LHKPN) yang telah disahkan berdasarkan Peraturan Direksi Nomor: HK.01/20/12/1/ADKS/UTMA/PLND-21 tanggal 20 Desember 2021 tentang Pedoman Pelaporan Harta Kekayaan Bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Struktural di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Adapun pengelola LHKPN yaitu:
1. Penanggung jawab: Group Head Kesekretariatan Perusahaan Kantor Pusat
2. Koordinator Bidang Kepegawaian: Group Head Layanan SDM Kantor Pusat
3. Koordinator Bidang Pengawasan: Group Head Hukum Kantor Pusat

Jumlah wajib lapor di lingkungan Pelindo sebanyak 366 orang. Pada tahun 2025 wajib lapor yang telah melaporkan LHKPN sebanyak 375 (97,60%) orang dan sebanyak 9 orang belum melaporkan.

STATE OFFICIAL WEALTH REPORT (LHKPN)

The Company has a policy regarding the management of State Official Wealth Report (LHKPN), which has been ratified based on the Board of Directors Regulation No. HK.01/20/12/1/ ADKS/ UTMA/PLND-21 dated December 20, 2021 concerning Guidelines for Wealth Report of Board of Directors, Board of Commissioners, and Structural Officers within PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

The management team of LHKPN are:
1. Person in charge: Corporate Secretarial Group Head of Head Office.
2. Personnel Coordinator: HC Services Group Head of Head Office.
3. Coordinator of Supervision: Legal Group Head of Head Office.

The number of mandatory reporters within Pelindo is 366. By 2025, 375 (97.60%) of those required to report their LHKPN, while 9 have not.

INSIDER TRADING

Insider trading adalah Perdagangan efek (jual atau beli) yang dilakukan seseorang dan atau sekelompok orang dengan dasar informasi atau fakta material yang telah diketahuinya terlebih dahulu sebelum informasi tersebut diinformasikan kepada publik, dengan tujuan mendapatkan keuntungan jalan pintas (*short swing profit*) di Pasar Modal.

INSIDER TRADING

Insider trading refers to the trading of securities (buying or selling) by an individual and/or a group based on material information or facts that they already possess before such information is disclosed to the public, with the aim of obtaining short-term profits (short swing profit) in the capital market.

Secara prinsip, Pelindo mendorong Karyawannya untuk berinvestasi dan memiliki efek (termasuk saham atau obligasi) yang dikeluarkan oleh Perseroan dan/atau perusahaan-perusahaan lain dalam group. Pelindo yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (Emiten Grup Pelindo), sebagai investasi jangka panjang dan tidak bersifat spekulatif. Namun investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

In principle, Pelindo encourages its employees to invest in and hold securities (including shares or bonds) issued by the Company and/or other companies within the group listed on the Indonesia Stock Exchange (Pelindo Group Issuers), as a long-term, non-speculative investment. However, such investments must be carried out in compliance with applicable laws and regulations.

Sesuai dengan Undang-undang Pasar Modal tersebut, dianggap melakukan *insider trading* apabila:
1. Adanya orang dalam.
2. Adanya informasi orang dalam yang bersifat material dan belum dipublikasikan kepada publik.
3. Adanya transaksi perdagangan efek oleh orang dalam berdasarkan informasinya tersebut.

Apabila salah satu dari tiga unsur di atas tidak terpenuhi, maka pelaku tindak kejahatan ini tidak dapat dianggap melakukan kejahatan insider trading. Untuk itu, urgensi pengetahuan, pemahaman dan penguasaan terhadap unsur-unsur insider trading tidak boleh dianggap sebelah mata. Pelarangan terkait insider trading secara jelas telah diatur pada Pedoman Kode Eitk Bisnis PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Selama tahun 2025 tidak terdapat *insider trading*.

In accordance with the Capital Market Law, a person is considered to have engaged in insider trading if:
1. There is an insider.
2. There is material non-public information.
3. There is a securities transaction conducted by the insider based on such information.

If any one of these three elements is not fulfilled, the act cannot be considered insider trading. Therefore, the importance of knowledge, understanding, and mastery of the elements of insider trading should not be underestimated. The prohibition of insider trading is clearly stipulated in the Code of Conduct of PT Pelabuhan Indonesia (Persero). During 2025, there were no cases of insider trading.

TATA KELOLA TERINTEGRASI
INTEGRATED GOVERNANCE

Sebagai wujud transparansi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) / Pelindo, serta sebagai tindak lanjut ketentuan yang tercantum pada Peraturan Menteri BUMN PER-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN. Pelindo membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi yang berada di bawah organ Dewan Komisaris.

Sebagai pengendali group perusahaan, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) memiliki kapasitas untuk mengawasi dan melakukan koordinasi di segala lini bisnis Perusahaan. Sinergi positif antara Pelindo dengan Anak Perusahaan diharapkan dapat mendukung upaya terwujudnya Pelindo sebagai Indonesia Maritime Gateway.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut di atas, diperlukan peran serta Pelindo untuk mengarahkan dan mengawasi Anak Perusahaan agar dalam pengelolaan setiap Anak Perusahaan agar sejalan dengan kebijakan strategis Pelindo guna mendorong penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik pada klasifikasi risiko Konglomerasi.

Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi pada Perusahaan Konglomerasi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) harus senantiasa berlandaskan pada 6 (Enam) prinsip dasar tata kelola yang baik yaitu:

1. Keterbukaan (*Transparency*)
   Perseroan menjamin adanya keterbukaan dan objektivitas dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan untuk menjalankan kegiatan usahanya. Perseroan harus menyediakan informasi yang bersifat materiil dan relevan mengenai Perusahaan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh para Pemangku Kepentingan. Perseroan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya informasi yang dipersyaratkan oleh Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga hal-hal yang penting dan mempengaruhi pengambilan keputusan para Pemangku Kepentingan sesuai dengan klasifikasi Informasi Perusahaan.
2. Akuntabilitas (*Accountability*)
   Perseroan bekerja dengan akuntabilitas tinggi serta mempertanggungjawabkan segala tindakannya secara transparan dan wajar untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku, etika perilaku bisnis, dan budaya Perusahaan dengan tetap memperhatikan kepentingan Stakeholders guna mencapai kinerja Perseroan secara berkesinambungan.

To demonstrate transparency in the implementation of Integrated Governance within PT Pelabuhan Indonesia (Persero)/Pelindo conglomerate, and as a follow-up to the provisions stipulated in the Minister of State-Owned Enterprises Regulation PER-02/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, Pelindo has established an Integrated Governance Committee under the Board of Commissioners.

As the controlling entity of the group, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) has the capacity to oversee and coordinate across all business lines. Positive synergy between Pelindo and its subsidiaries is expected to support Pelindo's efforts to establish itself as the Indonesian Maritime Gateway.

To achieve this, Pelindo's involvement is required to direct and supervise its subsidiaries to ensure that the management of each subsidiary aligns with Pelindo's strategic policies and encourages the implementation of good corporate governance within the conglomerate's risk classification.

The implementation of Integrated Governance at PT Pelabuhan Indonesia (Persero) conglomerate must always be based on the six basic principles of good governance, namely:

1. Transparency
   The Company guarantees openness and objectivity in its decision-making process for conducting its business activities. The Company must provide material and relevant information regarding the Company in a manner that is easily accessible and understandable to Stakeholders. The Company must take the initiative to disclose not only information required by the Articles of Association and applicable laws and regulations, but also matters that are important and influence Stakeholder decision-making in accordance with the Company's Information classification.
2. Accountability
   The Company operates with high accountability and is accountable for all its actions transparently and fairly for the benefit of the Company in accordance with the provisions of the Articles of Association, applicable laws and regulations, ethical business conduct, and corporate culture, while still considering the interests of Stakeholders to achieve sustainable Company performance.

3. Tanggung Jawab (*Responsibility*)
   Perseroan berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan Perusahaan, Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melaksanakan tanggung jawab sosial antara lain kepedulian terhadap Masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar Perseroan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai sehingga terpelihara kesinambungan usaha Perseroan.
4. Kemandirian (*Independent*)
   Perseroan dikelola secara profesional dengan menghindari benturan kepentingan serta pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)
   Dalam melaksanakan kegiatannya Perseroan senantiasa memperhatikan kepentingan berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.
6. Terpercaya (*Trusted*)
   Perusahaan mendapatkan kepercayaan dan dukungan penuh dari seluruh Pemangku Kepentingan.

3. Responsibility
   The Company adheres to the principle of prudence and ensures compliance with Company regulations, the Articles of Association, and applicable laws and regulations. It also carries out social responsibilities, including concern for the community and environmental sustainability, especially in the Company's vicinity. This is achieved through adequate planning and implementation to ensure the Company's business continuity.

4. Independence
   The Company is managed professionally, avoiding conflicts of interest and influence/pressure from any party that is inconsistent with applicable laws and regulations and sound corporate principles.

5. Fairness and Equality
   In carrying out its activities, the Company consistently considers the interests of all stakeholders based on the principles of fairness and equality.
6. Trustworthiness
   The Company enjoys the full trust and support of all stakeholders.

Struktur Grup

Group Structure

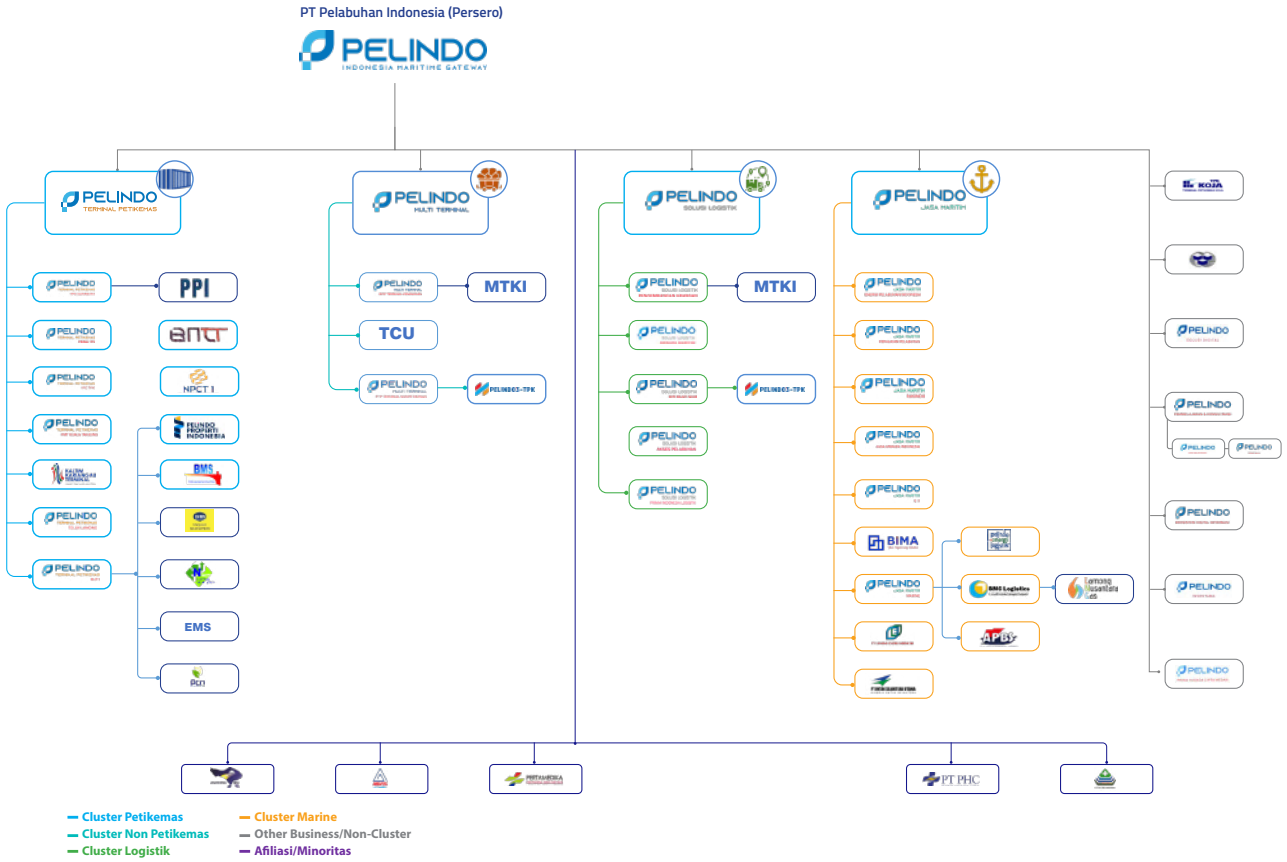

Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

Implementation of Public Company Governance Guidelines

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi Aspects; Principles; Recomendations	Comply or Explain
A.	**Aspek 1 : Hubungan Perusahaan Terbuka Dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham.** Aspect 1: Relationship between Public Company and Shareholders guaranteeing Shareholders' rights	
A.1.	**Prinsip 1 : Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).** Principle 1: Increase value of General Meetings of Shareholders (GMS) Implementation	
A.1.1.	Rekomendasi 1 : Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (voting) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham. Penjelasan : Setiap saham dengan hak suara yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara (one share one vote). Pemegang saham dapat menggunakan hak suaranya pada saat pengambilan keputusan, terutama dalam pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (voting). Namun demikian, mekanisme pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (voting) baik secara terbuka maupun tertutup belum diatur secara rinci. Perusahaan Terbuka direkomendasikan mempunyai prosedur pengambilan suara dalam pengambilan keputusan atas suatu mata acara RUPS. Adapun prosedur pengambilan suara (voting) tersebut harus menjaga independensi ataupun kebebasan pemegang saham. Sebagai contoh, dalam pengumpulan suara (voting) secara terbuka dilakukan dengan cara mengangkat tangan sesuai dengan instruksi pilihan yang ditawarkan oleh pimpinan RUPS. Sedangkan, dalam pengumpulan suara (voting) secara tertutup dilakukan pada keputusan yang membutuhkan kerahasiaan ataupun atas permintaan pemegang saham, dengan cara menggunakan kartu suara ataupun dengan penggunaan electronic voting. Recommendation 1: Public Company has open and closed voting based decision making mechanism and procedure that promote independency and interest of Shareholders. Explanation: Any shares with right to vote that issued have one vote (one share one vote). Shareholders may use their voting rights at the time of decision making, especially if voting needs to be done. However, the decision making mechanism by voting either openly or closedly has not been regulated in details. Public Company is recommended to have a voting procedure in making its decisions as one of GMS' agenda. The voting procedure must maintain shareholders's independency. For example, voting is done openly by raising hands to choose the options offered by the GMS' chairman. Meanwhile, closed voting is done in a decision making process that need secrecy or as requested by shareholders. This procedure may use card or electronic voting.	Perseroan tidak memiliki kebijakan terkait tata cara prosedur teknis pengumpulan suara (voting) secara terbuka maupun tertutup disebabkan karena Perseroan bukan merupakan Perusahaan Terbuka The Company does not have a policy regarding the technical procedures for open or closed voting because the Company is not a publicly traded company Comply
A.1.2.	Rekomendasi 2 : Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan. Penjelasan : Kehadiran seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka bertujuan agar setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dapat memperhatikan, menjelaskan, dan menjawab secara langsung permasalahan yang terjadi atau pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham terkait mata acara dalam RUPS. Recommendation 2: The entire member of the Public Company Board of Directors and Board of Commissioners attend the Annual GMS. Explanation: The presence of all members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners is intended to ensure that each member is able to observe, explain and answer directly the problems or questions raised by shareholders regarding the GMS' agenda.	Setiap tahunan Seluruh Direksi dan Dewan Komisaris menghadiri RUPS tahunan yang dipimpin oleh Pemegang Saham (kuasa Pemegang Saham) dari Pemerintah yang diwakili oleh Kementrian BUMN. Ketidakhadiran Direksi dan Dewan Komisaris disertai dengan Surat Kuasa Every year, all Directors and Board of Commissioners attend the Annual General Meeting of Shareholders, which is chaired by the Shareholder (proxy of the Shareholder) from the Government, represented by the Ministry of State-Owned Enterprises. The absence of Directors and Board of Commissioners is accompanied by a Power of Attorney. Comply

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi Aspects; Principles; Recomendations	Comply or Explain
A.1.3.	Rekomendasi 3 : Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun. Penjelasan : Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perusahaan Terbuka wajib membuat ringkasan risalah RUPS dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing (minimal dalam bahasa Inggris), serta diumumkan 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan kepada masyarakat, yang salah satunya melalui Situs Web Perusahaan Terbuka. Ketersediaan ringkasan risalah RUPS pada Situs Web Perusahaan Terbuka memberikan kesempatan bagi pemegang saham yang tidak hadir untuk mendapatkan informasi penting dalam penyelenggaraan RUPS secara mudah dan cepat. Oleh karena itu, ketentuan tentang jangka waktu minimal ketersediaan ringkasan risalah RUPS di Situs Web dimaksudkan untuk menyediakan kecukupan waktu bagi pemegang saham untuk memperoleh informasi tersebut. Recommendation 3: Summary of GMS Minutes shall be available at the Public Company Website minimum for 1 (one) year. Explanation: Public Company must prepare summary of GMS minutes in Indonesian and other languages (minimum in English), and announced to the public in 2 (two) working days after the GMS was held, one of it is through the Company's Website. The availability of summary of GMS minutes at the Company's website provides an opportunity for the absent shareholders in GMS to obtain important easily and quickly. Therefore, the regulation concerning the minimum period of the availability of summary of GMS minutes on the Website is intended to provide sufficient time for shareholders to obtain such information.	Perseroan bukan perusahaan terbuka sehingga tidak menerbitkan risalah RUPS pada web Perseroan. The Company is not a public company and therefore does not publish the minutes of the GMS on the Company's website. Comply
A.2.	**Prinsip 2 : Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor.** Principle 2: Improve quality of Communication between Public Company and Shareholders or Investors	
A.2.1.	Rekomendasi 4 : Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor. Penjelasan : Adanya komunikasi antara Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dimaksudkan agar para pemegang saham atau investor mendapatkan pemahaman lebih jelas atas informasi yang telah dipublikasikan kepada masyarakat, seperti laporan berkala, keterbukaan informasi, kondisi atau prospek bisnis dan kinerja, serta pelaksanaan tata kelola Perusahaan Terbuka. Disamping itu, pemegang saham atau investor juga dapat menyampaikan masukan dan opini kepada manajemen Perusahaan Terbuka. Kebijakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor menunjukan komitmen Perusahaan Terbuka dalam melaksanakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup strategi, program, dan waktu pelaksanaan komunikasi, serta panduan yang mendukung pemegang saham atau investor untuk berpartisipasi dalam komunikasi tersebut. Recommendation 4: Public Company has a policy on communication with shareholders or investors. Explanation: Any communication between the Company and shareholders or investors is intended for them to gain a clearer understanding of publicly available information, such as periodic reports, information disclosure, business or performance conditions and prospects, and Corporate Governance implementation. In addition, shareholders or investors may also submit feedback and opinions to the Company's management The Company's commitment in conducting communication with shareholders or investors is demonstrated by the communication policy. Such policy may includes strategies, programs, and communication timelines, as well as guidance that support shareholders or investors to participate in such communications.	Perusahaan memiliki kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor. Setiap tahunnya perusahan rutin melakukan pertemuan dengan Pemegang Saham, Investor dan Stakeholders lainnya untuk menyampaikan informasi dan aktifitas perusahan terkini termasuk isuisu yang berkembang. The company has a communication policy with shareholders and investors. Every year, the company holds regular meetings with shareholders, investors, and other stakeholders to share the latest information and activities, including emerging issues. Comply

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi Aspects; Principles; Recomendations	Comply or Explain
A.2.2.	Rekomendasi 5 : Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web. Penjelasan : Pengungkapan kebijakan komunikasi merupakan bentuk transparansi atas komitmen Perusahaan Terbuka dalam memberikan kesetaraan kepada semua pemegang saham atau investor atas pelaksanaan komunikasi. Pengungkapan informasi tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan peran pemegang saham atau investor dalam pelaksanaan program komunikasi Perusahaan Terbuka. Recommendation 5: Public Company shall disclose communication policy of Public Company with Shareholders or investors at the website. Explanation: The Company's commitment on transparency in providing equity to all shareholders or investors is shown in the communication policy disclosure. Such disclosure also aims to increase shareholders or investors' participation and role in the Company's communication program implementation	Dalam rangka keterbukaan informasi publik, Perseroan mempublikasikan laporan tahunan, laporan keuangan, dan informasi terkait lainnya di dalam situs Web secara berkala. Bagi stakeholders yang menginginkan informasi selain yang terdapat website dapat menyampaikan pada sistem PPID Pelindo di website Perseroan. To ensure public information transparency, the Company regularly publishes annual reports, financial statements, and other related information on its website. Stakeholders seeking information beyond that available on the website can submit it to Pelindo PPID system on the Company's website. Comply
B.	**Aspek 2 : Fungsi dan Peran Dewan Komisaris** Aspect 2: Board of Commissioners' Function and Role	
B.1.	**Prinsip 3 : Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris.** Principle 3: Strengthening Board of Commissioners membership and composition.	
B.1.1.	Rekomendasi 6 : Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka. Penjelasan : Jumlah anggota Dewan Komisaris dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dari Dewan Komisaris. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka wajib mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang paling kurang terdiri dari 2 orang berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Selain itu, perlu juga mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka yang antara lain yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran, serta pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan bisnis yang berbeda diantara Perusahaan Terbuka. Namun demikian, jumlah anggota Dewan Komisaris yang terlalu besar berpotensi dapat mengganggu efektivitas pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris. Recommendation 6: Determination of the number of Board of Commissioners member takes into account the condition of Public Company. Explanation: The number of Board of Commissioners members may affect their effectiveness in work. The number of members determination shall refer to the applicable laws, that at least 2 (two) persons according to Financial Services Authority Regulations No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies. In addition, it is also necessary to consider the Company's conditions which include, among other things, the characteristics, capacities and sizes, as well as the achievement of objectives and the fulfillment of different business needs among the Company. However, too many members of Board of Commissioners is potentially disrupt the effectiveness of Board of Commissioners' functions implementation.	Per 31 Desember 2024, anggota Dewan Komisaris Independen berjumlah 4 (empat) orang atau 57,14% persen dari total anggota Dewan Komisaris yang berjumlah 7 (tujuh) orang, sehingga telah memenuhi kriteria yang disyaratkan, yaitu minimal 20 persen dari total anggota Dewan Komisaris Perseroan. As of December 31, 2024, the number of Independent Commissioners is 4 (four) people or 57.14% of the total number of Independent Commissioners of 7 (seven) people, thus fulfilling the required criteria, namely a minimum of 20 percent of the total number of Independent Commissioners of the Company. Comply

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi Aspects; Principles; Recomendations	Comply or Explain
B.1.2.	Rekomendasi 7 : Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. Penjelasan : Komposisi Dewan Komisaris merupakan kombinasi karakteristik baik dari segi organ Dewan Komisaris maupun anggota Dewan Komisaris secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Karakteristik tersebut dapat tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka. Komposisi yang telah memperhatikan kebutuhan Perusahaan Terbuka merupakan suatu hal yang positif, khususnya terkait pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang lebih luas. Recommendation 7: Determination of the composition of Board of Commissioners members concerns diversity of required skill, knowledge and experience. Explanation: Board of Commissioners composition is a characteristics combination both in terms of Board of Commissioners as a body and Board of Commissioners members as an individual, in accordance with the Company's needs. Such characteristics may be reflected in the determination of skills, knowledge and experience required for supervisory and advisory tasks implementation by Board of Commissioners of the Company. Composition that has taken into account the needs of the Company is a positive thing, especially regarding decision-making in supervisory function implementation that consider various broader aspects.	Komposisi Dewan Komisaris perusahaan termasuk beragam dengan tingkat pengalaman dan kompetensi sesuai tugas dan fungsi yang dibutuhkan perusahaan dalam menjalankan fungsi pengawasan The composition of the company's Board of Commissioners includes a variety of levels of experience and competence according to the duties and functions required by the company in carrying out its supervisory function. Comply
B.2.	**Prinsip 4 : Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.** Principle 4: Improve Quality of Implementation of Board of Commissioners Duties and Responsibilities.	
B.2.1.	Rekomendasi 8 : Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris. Penjelasan : Kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) Dewan Komisaris merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Dewan Komisaris secara kolegial. Self assessment atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota untuk menilai pelaksanaan kinerja Dewan Komisaris secara kolegial, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Dewan Komisaris. Dengan adanya self assessment ini diharapkan masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Dewan Komisaris secara berkesinambungan. Dalam kebijakan tesebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolok ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, dimana adanya fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. Recommendation 8: Board of Commissioners has self assessment policy to evaluate its performance. Explanation: Board of Commissioners' self assessment policy is a guideline used as a form of accountability for Board of Commissioners' performance in a collegial manner. The Self Assessment is undertaken by each member to assess Board of Commissioners' performance in a collegial manner, rather than assessing the individual performance of each member. By doing self assessment, each member of Board of Commissioners is expected to contribute in continuous performance improvement. This policy contains assessment activities undertaken, purposes and objectives, periodic execution time, and assessment indicators or criteria used in accordance with the recommendations given by the nomination and remuneration function of the Company, where such function is required in Financial Services Authority Regulations No. 34/POJK.04/2014 on the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies.	Penilaian atas Kinerja Dewan Komisaris telah diatur dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan Board Manual. Dewan Komisaris juga memiliki Key Performance Indicator (KPI) secara kolegial maupun secara individu yang telah disetujui oleh Pemegang Saham, sebagai sasaran kerja dari Dewan Komisaris The Board of Commissioners' performance assessment is regulated in the Code of Corporate Governance and the Board Manual. The Board of Commissioners also has Key Performance Indicators (KPIs) both collegially and individually, approved by shareholders, as work targets. Comply

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi Aspects; Principles; Recomendations	Comply or Explain
B.2.2.	Rekomendasi 9 : Kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka. Penjelasan : Pengungkapan kebijakan self assessment atas kinerja Dewan Komisaris dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan keyakinan khususnya kepada para pemegang saham atau investor atas upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kinerja Dewan Komisaris. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme check and balance terhadap kinerja Dewan Komisaris. Recommendation 9: Self Assessment policy to evaluate Board of Commissioners' performance shall be disclosed in the Annual Report of Public Company. Explanation: The disclosure on policy of Board of Commissioners' performance Self Assessment is conducted not only to fulfill the transparency aspect as part of performance accountability, but also to give confidence to shareholders or investors upon the efforts to improve Board of Commissioners' performance. This disclosure enables shareholders or investors to acknowledge the check and balance mechanism on Board of Commissioners' performance.	Setiap tahunnya Perusahaan menerbitkan Laporan Tahunan yang disampaikan kepada Pemegang Saham dan di publikasikan melalui website perusahaan Didalam Laporan tahunan juga disajikan tugas dan kegiatan Dewan Komisaris dalam satu tahun terakhir termasuk memberikan penilaian atas kinerja Direksi dan peran Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan. Each year, the Company publishes an Annual Report, which is submitted to Shareholders and published on the company website. The Annual Report also presents the duties and activities of Board of Commissioners over the past year, including an assessment of Board of Directors' performance and Board of Commissioners' role in oversight. Comply
B.2.3.	Rekomendasi 10 : Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. Penjelasan : Kebijakan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Dewan Komisaris. Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Dewan Komisaris dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Recommendation 10: Board of Commissioners has policy on resignation of Board of Commissioners members if involved in financial crime. Explanation: The resignation policy of Board of Commissioners members that involved in financial crime is a policy that can increase stakeholders' trust in Public Company, so that the Company's integrity will be maintained. This policy is required to expedite the legal process and to ensure that the legal process does not interfere business activities. In addition, from morality side, this policy builds an ethical culture within the Company's environment. This policy may be covered in the Board Manual or Code of Conduct that are applicable to Board of Commissioners. Furthermore, what is meant by involved in financial crime is the convicted status of Board of Commissioners' member from the authorized party. Such financial crimes include manipulation and fraud in the financial service activities and Money Laundering Crime Act as referred to Law No.8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crime.	Perusahan memiliki Board Manual sebagai dasar tata kelola antar organ perusahaan yang mengatur tentang kebijakan pengunduran diri serta termasuk mengatur Etika jabatan dan hal-hal yang dilarang dilakukan oleh Dewan Komisaris. Selain itu Dewan Komisaris juga menandatangani Pakta Integritas sebagai komitmen penegakan Etika jabatan yang sesuai dengan nilai-nilai perusahaan. The company maintains a Board Manual as the basis for governance between company organs. It regulates resignation policies, as well as job ethics and prohibited conduct by Board of Commissioners. Furthermore, Board of Commissioners has signed an Integrity Pact as a commitment to upholding job ethics in accordance with company values. Comply

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi Aspects; Principles; Recomendations	Comply or Explain
B.2.4.	Rekomendasi 11 : Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi. Penjelasan : Berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, komite yang menjalankan fungsi nominasi mempunyai tugas untuk menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi. Salah satu kebijakan yang dapat mendukung proses Nominasi sebagaimana dimaksud adalah kebijakan suksesi anggota Direksi. Kebijakan mengenai suksesi bertujuan untuk menjaga kesinambungan proses regenerasi atau kaderisasi kepemimpinan di perusahaan dalam rangka mempertahankan keberlanjutan bisnis dan tujuan jangka panjang perusahaan. Recommendation 11: Board of Commissioners or Committee who is in charge in Nomination and Remuneration function formulates succession policy in Board of Directors members nomination process. Explanation: Based on Financial Services Authority Regulation No. 34/POJK.04/2014 concerning the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies, the nomination committee has duty to formulate policies and criteria required in Board of Directors' candidates nomination process. One of the policies is the succession policy of Board of Directors members. The succession policy aims to maintain the leadership regeneration process in the Company in order to maintain the Company's business sustainability and long-term goals.	Dewan Komisaris telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi yang bertugas melakukan proses nominasi untuk suksesi kepemimpian perusahaan termasuk Direksi Board of Commissioners has formed a Nomination and Remuneration Committee which is tasked with carrying out the nomination process for the succession of the company's leadership, including Board of Directors. Comply
C.	**Aspek 3 : Fungsi dan Peran Direksi** Aspect 3: Board of Directors' Role and Function	
C.1.	**Prinsip 5 : Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi.** Principle 5: Strengthening Board of Directors membership and composition	
C.1.1.	Rekomendasi 12 : Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektifitas dalam pengambilan keputusan. Penjelasan : Sebagai organ perusahaan yang berwenang dalam pengurusan perusahaan, penentuan jumlah Direksi sangat mempengaruhi jalannya kinerja Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, penentuan jumlah anggota Direksi harus dilakukan melalui pertimbangan yang matang dan wajib mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dimana berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang. Disamping itu, dalam penentuan jumlah Direksi harus didasarkan pada kebutuhan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan Terbuka dan disesuaikan dengan kondisi Perusahaan Terbuka yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran Perusahaan Terbuka serta bagaimana tercapainya efektivitas pengambilan keputusan Direksi. Recommendation 12: Determination of the number of Board of Directors members takes into account the condition of the Public Company and effectiveness in the decision making process. Explanation: As corporate body in charge of managing the Company, the determination of the number of Board of Directors greatly affects the Company's performance. Thus, the number of Board of Directors' members determination shall be conducted through careful consideration and shall refer to the prevailing laws and regulations, which in accordance with Financial Services Authority Regulations No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies that shall comprises of at least 2 (two) persons. In addition, in determining the number of Board of Directors shall be based on the need to achieve the Company's goals and objectives and adjusted to the Company's conditions, including characteristics, capacity and size, and how effective Board of Directors in decision making.	Saat ini jumlah Direksi sebanyak 7orang yang salah satunya berperan sebagai Direktur Utama. Pembagian tugas Direksi terdiri atas 7 Direktorat yang saling terkait dan sesuai dengan kebutuhan perusahan ke depan. Setiap Direktorat membawahi DivisiDivisi yang telah disesuaikan dan dikelompokkan berdasarkan tugas dan fungsi dari masing-masing Direktorat, sehingga setiap Divisi memiliki tugas dan fungsi yang saling melengkapi untuk pencapaian tujuan perusahaan. Saat ini perusahan memiliki 23 Divisi yang di pimpin oleh Group Head dan dibantu oleh Departement Head Currently, Board of Directors consists of seven members, one of whom serves as the President Director. Board of Directors' duties are divided into seven interrelated Directorates, aligned with the company's future needs. Each Directorate oversees Divisions, which have been aligned and grouped based on their respective duties and functions. This ensures that each Division has complementary duties and functions to achieve the company's goals. The company currently has 23 Divisions, led by Group Heads and assisted by Department Heads. Comply

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi Aspects; Principles; Recomendations	Comply or Explain
C.1.2.	Rekomendasi 13 : Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. Penjelasan : Seperti halnya Dewan Komisaris, keberagaman komposisi anggota Direksi merupakan kombinasi karakteristik yang diinginkan baik dari segi organ Direksi maupun anggota Direksi secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Kombinasi tersebut ditentukan dengan cara memperhatikan keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai pada pembagian tugas dan fungsi jabatan Direksi dalam mencapai tujuan Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, pertimbangan kombinasi karakteristik dimaksud akan berdampak dalam ketepatan proses pencalonan dan penunjukan individual anggota Direksi ataupun Direksi secara kolegial. Recommendation 13: Determination of Board of Directors members composition takes into account the diversity of required skill, knowledge and experience. Explanation: As with Board of Commissioners, the diversity of Board of Directors' members composition is the desirable characteristics of Board of Directors as an organization and Board of Directors members as an individual, in accordance to the Company's needs. The combination is determined by taking into account the appropriate skills, knowledge and experiences on Board of Directors' division and functions in achieving the Company's objectives. Therefore, the characteristics consideration will have an impact in the accuracy of nomination process and individual appointment of Board of Directors's members in a collegial manner.	Perusahaan saat ini memiliki komposisi anggota Direksi yang beragam namun sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan pengalaman dan kompetensi yang mumpuni. The company currently has a diverse composition of Board of Directors members, but in accordance with their duties and functions based on their experience and competence. Comply
C.1.3.	Rekomendasi 14 : Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. Penjelasan : Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh Perusahaan Terbuka, yang wajib disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia dan juga peraturan OJK terkait, antara lain peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyajian dan pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan Terbuka. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tanggung jawab Direksi atas Laporan Keuangan, Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas Laporan Keuangan, yang ditandatangani Direktur Utama dan anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan. Dengan demikian, pengungkapan dan penyusunan informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan akan sangat tergantung pada keahlian, dan/atau pengetahuan Direksi, khususnya anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan. Adanya kualifikasi keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi yang setidaknya dimiliki anggota Direksi dimaksud dapat memberikan keyakinan atas penyusunan Laporan Keuangan, sehingga Laporan Keuangan tersebut dapat diandalkan oleh para pemangku kepentingan (stakeholders) sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi terkait Perusahaan Terbuka dimaksud. Keahlian dan/atau pengetahuan tersebut dapat dibuktikan dengan latar belakang pendidikan, sertifikasi pelatihan, dan/atau pengalaman kerja terkait. Recommendation 14: Board of Directors member who supervises Accounting or Finance has expertise and/or knowledge in Accounting. Explanation: The Financial Statements is the management accountability report on managing the resources owned by the Public Company, which must be prepared and presented in accordance with the generally accepted Financial Accounting Standards in Indonesia as well as related OJK regulations, including regulation on the Capital Market sector regarding the presentation and disclosure of Public Company's Financial Statements. Under the Capital Market sector laws and regulations that governing Board of Directors' responsibilities on the Financial Statements, Board of Directors is jointly and severally liable for the Financial Statements, signed by the President Director and Director that is in charge of accounting or finance. Thus, the disclosure and compilation of financial information presented in the financial statements will largely depend on the expertise, and/or knowledge of Board of Directors, especially members of Board of Directors in charge of accounting or finance. The expertise and/or knowledge qualification in the accounting field at least give Board of Directors members confidence in the preparation of Financial Statements, so that the Financial Statements can be relied upon by the stakeholders as the basis for economic decision making. Such expertise and/or knowledge may be evidenced by educational background, training certification and/or related work experience.	Direksi bertanggung jawab dalam penyajian laporan keuangan dan setiap tutup tahun dilakukan audit kewajaran atas penyajian laporan keuangan oleh Auditor eksternal. Direksi yang membawahi bidang akuntansi dan keuangan melakukan fungsi pengendalian disetiap proses transaksi keuangan sampai transaksi tersebut dibukukan dalam pencatatan keuangan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi dan Keuangan yang senantiasa dievaluasi dan disesuaikan dengan ketentuan PSAK terkini. Direksi yang membawahi bidang akuntansi dan keuangan memiliki kualifikasi dan kompetensi serta pengalaman yang memadai dalam menjalankan tugas-tugasnya. Board of Directors is responsible for the presentation of financial statements, and at the end of each year, an external auditor conducts a fairness audit of the presentation of these financial statements. Board of Directors overseeing accounting and finance performs a control function over every financial transaction process until the transaction is recorded in the financial records in accordance with the Accounting and Financial Policies, which are continuously evaluated and adjusted to the latest PSAK provisions. Board of Directors overseeing accounting and finance has the qualifications, competencies, and experience necessary to carry out their duties. Comply

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi Aspects; Principles; Recomendations	Comply or Explain
C.2.	Prinsip 6 : Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi. Principle 6: Improve the quality of Board of Directors duty and responsibility implementation.	
C.2.1.	Rekomendasi 15 : Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Direksi. Penjelasan : Seperti halnya pada Dewan Komisaris, kebijakan penilaian sendiri (self assessment) Direksi merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Direksi secara kolegial. Self assessment atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota Direksi untuk menilai pelaksanaan kinerja Direksi secara kolegial, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Direksi. Dengan adanya self assessment ini diharapkan masing-masing anggota Direksi dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Direksi secara berkesinambungan. Dalam kebijakan tesebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolak ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, dimana pembentukan fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. Recommendation 15: Board of Directors has self assessment policy to evaluate Board of Directors' performance. Explanation: As with Board of Commissioners, Board of Directors' self assessment policy is a guideline used as a performance accountability for Board of Directors in a collegial manner. The Self Assessment is conducted by each member of Board of Directors to assess Board of Directors' performance in a collegial manner rather than assessing the individual performance of each member of Board of Directors. With the existence of Self Assessment is expected that each member of Board of Directors can contribute to improve Board of Directors' performance on an ongoing basis. The policy contains assessment activities undertaken, purposes and objectives, periodic execution time, and assessment indicators and criteria used in accordance with the recommendations given by the nomination and remuneration function of the Company, where such function is required in Financial Services Authority Regulation No. 34/POJK.04/2014 on the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies.	Setiap triwulan Direksi menerbitkan laporan kinerja perusahaan dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham. Kebijakan penilaian kinerja Direksi sesuai dengan Pedoman tata kelola perusahaan dan Board Manual. Pelaporan atas Kinerja Direksi sesuai dengan *Key Performace Indicator* (KPI) yang telah disetujui oleh Pemegang Saham dan Dewan Komisaris. Penilaian Direksi dilakukan secara Kolegial dan Individual. Every quarter, Board of Directors publishes a company performance report, which is submitted to the Board of Commissioners and Shareholders. Board of Directors' performance assessment policy complies with the Code of Corporate Governance and the Board Manual. Board of Directors' performance reporting is based on Key Performance Indicators (KPIs) approved by Shareholders and the Board of Commissioners. Board of Directors' assessments are conducted collegially and individually. Comply
C.2.2.	Rekomendasi 16 : Kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka. Penjelasan : Pengungkapan kebijakan *self assessment* atas kinerja Direksi dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan informasi penting atas upaya-upaya perbaikan dalam pengelolaan Perusahaan Terbuka. Informasi tersebut sangat bermanfaat untuk memberikan keyakinan kepada pemegang saham atau investor bahwa terdapat kepastian pengelolaan perusahaan terus dilakukan ke arah yang lebih baik. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme check and balance terhadap kinerja Direksi. Recommendation 16: Self-assessment policy to evaluate Board of Director's performance shall be disclosed in the Annual Report of Public Company. Explanation: The disclosure of Self Assessment policy on Board of Directors' performance is conducted not only to fulfill the transparency aspect as a performance accountability, but also to provide important information regarding improvement efforts in the management of the Public Company. Such information is very useful to provide confidence to shareholders or investors that there is certainty of corporate management to be continuously carried out in a better direction. With the disclosure, shareholders or investors acknowledge the check and balance mechanism on Board of Directors' performance	Direksi telah mengungkapkan penilaian kinerja Direksi melalui laporan tahunan Perusahaan. Board of Directors has disclosed its performance assessment through the Company's annual report. Comply

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi Aspects; Principles; Recomendations	Comply or Explain
C.2.3.	Rekomendasi 17 : Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. Penjelasan : Kebijakan pengunduran diri anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini akan membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Direksi. Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Direksi dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Recommendation 17: Board of Directors has policy related to resignation of Board of Directors member if involved in financial crime. Explanation: The resignation policy of Board of Directors members that involved in financial crime is a policy that can increase stakeholders' trust in Public Company, so that the Company's integrity will be maintained. This policy is required to expedite the legal process and to ensure that the legal process does not interfere business activities. In addition, from morality side, this policy builds an ethical culture within the Company's environment. This policy may be covered in the Guidelines or Code of Conducts that are applicable to Board of Directors. Furthermore, what is meant by involved in financial crime is the convicted status of Board of Directors member from the authorized party. Such financial crimes include manipulation and fraud in the financial service activities and Money Laundering Crime Act as referred to Law No.8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crime.	Perusahan memiliki Board Manual sebagai dasar tata kelola antar organ perusahaan yang mengatur pengunduran diri anggota Direksi termasuk mengatur Etika jabatan dan halhal yang dilarang dilakukan oleh Direksi. Selain itu Direksi juga menandatangani Pakta Integritas sebagai komitmen penegakan Etika jabatan yang sesuai dengan nilai-nilai perusahaan. The company has a Board Manual as the basis for governance between company organs. It regulates the resignation of members of Board of Directors, as well as the ethics of the position and prohibited conduct by the Board of Directors. Furthermore, Board of Directors has signed an Integrity Pact as a commitment to upholding ethics in line with the company's values. Comply
D.	Aspek 4 : Partisipasi Pemangku Kepentingan Aspect 4: Stakeholders Participation	
D.1.	Prinsip 7 : Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan. Principle 7: Improve Corporate Governance Aspect through Stakeholders Participation.	
D.1.1.	Rekomendasi 18 : Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya *insider trading*. Penjelasan : Seseorang yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan suatu transaksi Efek dengan menggunakan informasi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pasar Modal. Perusahaan Terbuka dapat meminimalisir terjadinya insider trading tersebut melalui kebijakan pencegahan, misalnya dengan memisahkan secara tegas data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dengan yang bersifat publik, serta membagi tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan informasi dimaksud secara proporsional dan efisien. Recommendation 18: Public Company has policy to prevent insider trading. Explanation: A person who has inside information is prohibited to engaging in a Securities transaction by using inside information as referred to the Capital Market Law. Public Companies can minimize the occurrence of insider trading through prevention policies, for example by strictly separating confidential data and/or public information, as well as dividing the management duties and responsibilities for such information in a proportionate and efficient manner.	Perusahaan tidak menerbitkan Saham pada Pasar Modal, karena perusahaan merupakan BUMN yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah. The company does not issue shares on the capital market, because the company is a state-owned enterprise whose shares are owned by the government. Comply

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi Aspects; Principles; Recomendations	Comply or Explain
D.1.2.	Rekomendasi 19 : Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti fraud. Penjelasan : Kebijakan anti korupsi bermanfaat untuk memastikan agar kegiatan usaha Perusahaan Terbuka dilakukan secara legal, prudent, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Kebijakan tersebut dapat merupakan bagian dalam kode etik, ataupun dalam bentuk tersendiri. Dalam kebijakan tersebut dapat meliputi antara lain mengenai program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (kickbacks), fraud, suap dan/atau gratifikasi dalam Perusahaan Terbuka. Lingkup dari kebijakan tersebut harus menggambarkan pencegahan Perusahaan Terbuka terhadap segala praktik korupsi baik memberi atau menerima dari pihak lain. Recommendation 19: Public Company has anti-corruption and anti-fraud policy. Explanation: Anti-corruption policy is useful to ensure that the Company's business activities are conducted legally, prudently, and in accordance with the principles of good governance. The policy may be part of the code of conduct, or in its own form. The policy may include, among others, the programs and procedures undertaken in overcoming corrupt practices, kickbacks, fraud, bribery and/or gratification in the Public Company. The policy scope should illustrate the Public Company's prevention against any corrupt practices of either giving or receiving from other parties.	Perusahaan memiliki kebijakan Kode Etik Bisnis dimana di dalamnya mengatur mengenai anti korupsi dan anti fraud Selain itu Seluruh Pegawaii juga menandatangani Pakta Integritas sebagai komitmen penegakan Etika jabatan yang sesuai dengan nilai-nilai perusahaan The company has a Code of Conduct policy that regulates anti-corruption and anti-fraud. Furthermore, all employees sign an Integrity Pact as a commitment to upholding professional ethics in accordance with company values. Comply
D.1.3.	Rekomendasi 20 : Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor. Penjelasan : Kebijakan tentang seleksi pemasok atau vendor bermanfaat untuk memastikan agar Perusahaan Terbuka memperoleh barang atau jasa yang diperlukan dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang baik. Sedangkan kebijakan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor bermanfaat untuk memastikan bahwa rantai pasokan (supply chain) berjalan dengan efisien dan efektif. Kemampuan pemasok atau vendor dalam memasok/memenuhi barang atau jasa yang dibutuhkan perusahaan akan mempengaruhi kualitas output perusahaan. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut dapat menjamin kontinuitas pasokan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang dibutuhkan Perusahaan Terbuka. Adapun cakupan kebijakan ini meliputi kriteria dalam pemilihan pemasok atau vendor, mekanisme pengadaan yang transparan, upaya peningkatan kemampuan pemasok atau vendor, dan pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengan pemasok atau vendor. Perseroan memiliki kebijakan terkait pengadaan barang dan jasa yang berisi tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor yang tertuang dalam standar Pedoman Procurement. Recommendation 20: Public Company has policy on suppliers and vendors selection and capacity building. Explanation: The policy on suppliers or vendors selection is useful to ensure that Public Company obtains the goods or services needed at competitive prices and good quality. While the policy on capacity building of suppliers or vendors is useful to ensure that the supply chain runs efficiently and effectively. The ability of suppliers or vendors to supply/fulfill the goods or services needed by the Company will affect the quality of the Company's output. The implementation of these policies can guarantee supply continuity, both in terms of quantity and quality required by Public Company. The scope of these policies includes criteria in selecting suppliers or vendors, transparent procurement mechanism, efforts to increase the ability of suppliers or vendors, and fulfillment of rights relating to suppliers or vendors. The Company has a policy related to the procurement of goods and services which contains the selection and improvement of supplier or vendor capabilities as stated in the standard Procurement Guidelines.	Perusahaan memiliki Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Peraturan Direksi yang telah mengatur mengenai mekanisme seleksi pemasok/vendor dan jenis-jenis pengadaannya. The Company has a Goods and Services Procurement Policy through a Board of Directors Regulation which regulates the supplier/vendor selection mechanism and types of procurement. Comply

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi Aspects; Principles; Recomendations	Comply or Explain
D.1.4.	Rekomendasi 21 : Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur. Penjelasan : Kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pinjaman kepada kreditur. Tujuan dari kebijakan dimaksud adalah untuk menjaga terpenuhinya hak-hak dan menjaga kepercayaan kreditur terhadap Perusahaan Terbuka. Dalam kebijakan tersebut mencakup pertimbangan dalam melakukan perjanjian, serta tindak lanjut dalam pemenuhan kewajiban Perusahaan Terbuka kepada kreditur. Recommendation 21: Public Company has policy on creditors' rights fulfillment. Explanation: The creditors' rights fulfillment policy is used as a guide in providing loan to creditors. The policy's objective is to maintain the rights fulfillment and the creditors' trust to the Company. The policy includes consideration in making agreements, as well as follow-up in obligations fulfilment by the Company to the creditors.	Perseroan memiliki kebijakan perlindungan kreditur yang tertuang dalam Pedoman Good Corporate Governance Pelindo Nomor:HK. 01/13/12/4/TKPT/UTMA/PLND-23 Tanggal 13 Desember 2023. Perseroan menjunjung hak-hak para Kreditur dengan menghormati kewajiban sesuai kontrak dan menyampaikan informasi yang diperlukan yang harus diungkapkan berdasarkan undang-undang, peraturan lain yang berlaku serta best practice. The Company has a creditor protection policy as stated in Pelindo's Code of Good Corporate Governance Number: HK. 01/13/12/4/TKPT/UTMA/PLND-23 Dated December 13, 2023. The Company upholds the rights of Creditors by honoring contractual obligations and conveying the necessary information that must be disclosed based on laws, other applicable regulations and best practices. Comply

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi Aspects; Principles; Recomendations	Comply or Explain
D.1.5.	Rekomendasi 22 : Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem whistleblowing. Penjelasan : Kebijakan sistem whistleblowing yang telah disusun dengan baik akan memberikan kepastian perlindungan kepada saksi atau pelapor atas suatu indikasi pelanggaran yang dilakukan karyawan atau manajemen Perusahaan Terbuka. Penerapan kebijakan sistem tersebut akan berdampak pada pembentukan budaya tata kelola perusahaan yang baik. Kebijakan sistem whistleblowing mencakup antara lain jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui sistem whistleblowing, cara pengaduan, perlindungan dan jaminan kerahasiaan pelapor, penanganan pengaduan, pihak yang mengelola aduan, dan hasil penanganan dan tindak lanjut pengaduan. Recommendation 22: Public Company has whistleblowing system policy. Explanation: Well-structured whistleblowing policy will provide protection assurance to witnesses or whistleblowers for a violation indication committed by employee or management. Policy system implementation will have an impact on the establishment of good corporate governance culture. Whistleblowing system policies include, among others, types of offenses, complaints, whistleblower's protection and confidentiality, complaint handling, complaint handling party, and the results of handling and follow-up.	Perusahaan telah memiliki kebijakan Whistleblowing System (WBS) melalui Peraturan Direksi No SK.01.01/13/12/3/TKPT/UTMA/PLND-23 tanggal 13 Desember 2023 tentang pedoman Whistleblowing System PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Sistem WBS diterapkan melalui 6 saluran utama yaitu: Web Online : https://pelindobersih.whistleblowing.link/ Telepon: +62 21 2782 2345 Faksimile: +62 21 2782 3456 SMS / WhatsApp: +62 811 933 2345 / +62 811 9511 665 Email: pelindobersih@whistleblowing.link Pos: Pelindo Bersih. PO Box 1074. JKS 12010 Perseroan juga mempunyai Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) tentang Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pelindo Bersih dalam Pelaksanaan Whistleblowing System PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor SK.01.01/25/7/1/TKPT/UTMA/PLND-23 tanggal 25 Juli 2023 The company has a Whistleblowing System (WBS) policy through Board of Directors Regulation No. SK.01.01/13/12/3/TKPT/UTMA/PLND-23 dated December 13, 2023, concerning the Whistleblowing System Guidelines for PT Pelabuhan Indonesia (Persero). The WBS system is implemented through six main channels: Online Website: https://pelindobersih.whistleblowing.link/ Telephone: +62 21 2782 2345 Facsimile: +62 21 2782 3456 SMS / WhatsApp: +62 811 933 2345 / +62 811 9511 665 Email: pelindobersih@whistleblowing.link Postal: Pelindo Bersih. PO Box 1074. JKS 12010 The Company also has a Decree of Board of Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) concerning Duties and Responsibilities of Pelindo Bersih Committee in the Implementation of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Whistleblowing System, Number SK.01.01/25/7/1/TKPT/UTMA/PLND-23 dated July 25, 2023. Comply

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi Aspects; Principles; Recomendations	Comply or Explain
D.1.6.	Rekomendasi 23 : Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan. Penjelasan : Insentif jangka panjang merupakan insentif yang didasarkan atas pencapaian kinerja jangka panjang. Rencana insentif jangka panjang mempunyai dasar pemikiran bahwa kinerja jangka panjang perusahaan tercermin oleh pertumbuhan nilai dari saham atau target-target jangka panjang perusahaan lainnya. Insentif jangka panjang bermanfaat dalam rangka menjaga loyalitas dan memberikan motivasi kepada Direksi dan karyawan untuk menigkatkan kinerja atau produktivitasnya yang akan berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Adanya suatu kebijakan insentif jangka panjang merupakan komitmen nyata Perusahaan Terbuka untuk mendorong pelaksanaan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan Karyawan dengan syarat, prosedur dan bentuk yang disesuaikan dengan tujuan jangka panjang Perusahaan Terbuka. Kebijakan dimaksud dapat mencakup antara lain maksud dan tujuan pemberian insentif jangka panjang, syarat dan prosedur dalam pemberian insentif, dan kondisi dan risiko yang harus diperhatikan oleh Perusahaan Terbuka dalam pemberian insentif. Kebijakan tersebut juga dapat tercakup dalam kebijakan remunerasi Perusahaan Terbuka yang ada. Recommendation 23: Public Company has long-term incentives for Board of Directors and employees. Explanation: Long-term incentives are incentive based on long-term performance achievement. Long-term incentive plan has a rationale that the Company's long-term performance is reflected by the stock value growth or other long-term targets of the Company. Long-term incentives are useful in order to maintain loyalty and motivate Board of Directors and employees to improve performance or productivity that will impact on improving the Company's performance over the long term. The long-term incentives policy is the Company's actual commitment to encourage the long-term incentives to Board of Directors and Employees on terms, procedures and forms that are comply to long-term objectives of the Company. Such policies may include, goals and purposes of providing long-term incentives, terms and procedures for granting incentives, as well as the conditions and risks to be considered by the Company in providing incentives. The policy may also be included in the Company's existing remuneration policy.	Perusahaan telah memiliki Jaminan Hari Tua untuk Direksi dan Karyawan Selain itu Direksi juga diberikan asuransi purna jabatan The company has established a retirement benefit for directors and employees. Furthermore, directors are also provided with retirement insurance. Comply
E.	Aspek 5 : Keterbukaan Informasi Aspect 5: Information Disclosure	
E.1.	Prinsip 8 : Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi. Principle 8: Improve the implementation of information disclosure.	
E.1.1.	Rekomendasi 24 : Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi. Penjelasan : Penggunaan teknologi informasi dapat bermanfaat sebagai media keterbukaan informasi. Adapun keterbukaan informasi yang dilakukan tidak hanya keterbukaan informasi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun juga informasi lain terkait Perusahaan Terbuka yang dirasakan bermanfaat untuk diketahui pemegang saham atau investor. Dengan pemanfaatan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web diharapkan perusahaan dapat meningkatkan efektivitas penyebaran informasi perusahaan. Meskipun demikian, pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan tetap memperhatikan manfaat dan biaya perusahaan. Recommendation 24: Public Company utilizes broader information technology application besides website as means of information disclosure. Explanation: Information technology can be useful as a way of information disclosure. The information disclosure is not only those that have been regulated in legislation, but also other information related to the Company that is felt useful to be known by shareholders or investors. With the utilization of more widely technology than the Website, the Company is expected to improve the corporate information dissemination effectiveness. Nevertheless, the information technology utilization should still pay attention to the Company's benefits and costs.	Perusahaan telah memiliki website resmi melalui www.pelindo.co.id, pemutahiran websites ini dilakukan secara periodik dan merupakan tanggungjawab Sekretariat perusahaan. Selain itu perusahaan juga memiliki media social melalui Youtube, Twitter, Facebook dan instagram The company has an official website at www.pelindo.co.id. This website is updated periodically and is the responsibility of the Corporate Secretariat. In addition, the company also maintains social media channels on YouTube, Twitter, Facebook, and Instagram. Comply

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi Aspects; Principles; Recomendations	Comply or Explain
E.1.2.	Rekomendasi 25 : Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali. Penjelasan : Peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyampaian laporan tahunan Perusahaan Terbuka telah mengatur kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Perusahaan Terbuka, serta kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Perusahaan Terbuka baik langsung maupun tidak langsung sampai dengan pemilik manfaat terakhir dalam kepemilikan saham tersebut. Dalam Pedoman Tata Kelola ini direkomendasikan untuk mengungkapkan pemilik manfaat akhir atas kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain mengungkapkan pemilik manfaat akhir dari kepemilikan saham oleh pemegang saham utama dan pengendali. Recommendation 25: Annual Report of Public Company shall disclose the shareholding of Public Company minimum 5% (five percent), in addition to disclosure of end-benefit owners in the shareholding of Public Company via major and controlling shareholders. Explanation: The Capital Market sector legislation in governing the Company's annual report submission has set out the obligation to disclose information regarding the shareholders of 5% (five percent) or more as well as the major and controlling shareholders of the Company either directly or indirectly up to the end-benefit owners in the ownership of such shares. In the Governance Manual, it is recommended to disclose the end-benefit owners of Public Company's shares of at least 5% (five percent), other than to disclose the end-benefit owners of shares by major and controlling shareholders.	Saham Perusahaan saat masih dimiliki oleh mayoritas Pemerintah, karena status perusahaan sebagai BUMN. Saham Perusahaan belum dimiliki oleh masyarakat karena perusahaan belum melakukan IPO. The Company's shares are currently majority-owned by the government due to its status as a state-owned enterprise. The Company's shares are not yet publicly owned because the company has not yet conducted an IPO. Comply

GOOD CORPORATE GOVERNANCE ASSESSMENT

Dalam melakukan penilaian atas penerapan GCG, Perseroan mengacu pada Corporate Governance Perception Index 2024 (CGPI 2024) yang diselenggarakan pada tahun 2025. Perjalanan penyelenggaraan CGPI selalu berfokus pada tema bisnis perusahaan yang konsisten memberikan semangat perbaikan (continuous improvement) dalam mempersiapkan perusahaan beradaptasi dengan perkembangan lingkungan eksternalnya dan melaksanakan integrasi sesuai dengan tuntutan lingkungan internalnya guna menjamin pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan.

Program CGPI 2024 mengangkat tema penilaian "Membangun Kapabilitas Dinamis Perusahaan Dalam Kerangka Good Corporate Governance" dapat dimaknakan sebagai inisiatif strategis membangun sistem manajemen yang sesuai dengan prinsip bisnis yang baik sesuai prinsip, tata nilai, dan kepatuhan, guna menciptakan nilai dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan secara etikal dan bermartabat. Melalui tema di atas CGPI 2024 berupaya mengungkapkan segala daya dan upaya perusahaan dalam membangun sistem manajemen yang optimal atau dalam tingkatan yang "*mature*" dengan pemanfaatan sumber daya yang efektif dan efisien dan selaras dengan prinsip, nilai dan kepatuhan GCG, sehingga mencapai pertumbuhan berkelanjutan.

GOOD CORPORATE GOVERNANCE ASSESSMENT

In assessing the implementation of Good Corporate Governance (GCG), the Company refers to the Corporate Governance Perception Index 2024 (CGPI 2024), which was conducted in 2025. The CGPI program consistently focuses on business themes that promote continuous improvement, preparing companies to adapt to external environmental developments and integrate internal demands to ensure sustainable growth.

CGPI 2024 program carries the theme "Building Dynamic Corporate Capabilities within a Good Corporate Governance Framework," which reflects a strategic initiative to develop management systems aligned with sound business principles, values, and compliance. This aims to create value and ensure sustainable, ethical, and dignified growth. Through this theme, CGPI 2024 seeks to highlight companies' efforts in building optimal or mature management systems by utilizing resources effectively and efficiently, in line with GCG principles, values, and compliance, to achieve sustainable growth.

KRITERIA PENILAIAN

CGPI 2024 dengan tema "Membangun Kapabilitas Dinamis Perusahaan Dalam Kerangka Good Corporate Governance" dinilai dari pemenuhan aspek dan indikator penilaian, meliputi 3 aspek penilaian yang kemudian dirinci kedalam 25 indikator penilaian. Penjelasan secara rinci disimak sebagai berikut:

1. Aspek Struktur Tata Kelola (Governance Structure)
   Aspek ini merupakan penilaian terhadap kelengkapan Organ, struktur dan infrastruktur yang optimal di perusahaan sesuai prinsip, tata nilai, dan kepatuhan, guna menciptakan nilai dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan secara etikal dan bermartabat. Secara rinci aspek struktur tata kelola ini terdiri dari beberapa indikator berikut:
   a. Pemegang Saham & RUPS
   b. Dewan Direksi
   c. Direksi
   d. Organ Pendukung Dewan Komisaris
   e. Organ Kelengkapan Direksi
   f. Manajemen Fungsional

2. Aspek Proses Tata Kelola (*Governance Process*)
   Aspek ini merupakan penilaian terhadap sistem manajemen yang mampu mewujudkan optimalisasi seluruh fungsi manajemen sesuai dengan perubahan lingkungan kontekstual perusahaan, serta prinsip, tata nilai, dan kepatuhan, guna menciptakan nilai dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan secara etikal dan bermartabat. Secara rinci aspek proses tata kelola terdiri dari beberapa indikator berikut:
   a. Sistem dan Mekanisme Tata Kelola Pemegang Saham dan RUPS
   b. Sistem dan Mekanisme Tata Kelola Dewan Komisaris dan Direksi
   c. Sistem dan Mekanisme Tata Kelola Perilaku Keorganisasian
   d. Sistem dan Mekanisme Tata Kelola Pengungkapan dan Keterbukaan Informasi
   e. Sistem dan Mekanisme Tata Kelola Risiko
   f. Sistem dan Mekanisme Tata Kelola Kepatuhan
   g. Sistem dan Mekanisme Tata Kelola Pengendalian dan Pengawasan
   h. Sistem dan Mekanisme Tata Kelola Perencanaan Strategis.
   i. Sistem dan Mekanisme Tata Kelola Infrastruktur Organisasi
   j. Sistem dan Mekanisme Tata Kelola Teknologi Informasi
   k. Sistem dan Mekanisme Tata Kelola Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
   l. Sistem dan Mekanisme Tata Kelola Kreativitas dan Inovasi
   m. Sistem dan Mekanisme Tata Kelola Membangun Kematangan Perusahaan

ASSESSMENT CRITERIA

2024 CGPI with the theme "Building Dynamic Corporate Capabilities Within a Good Corporate Governance Framework," is assessed based on the fulfillment of assessment aspects and indicators. These aspects are then broken down into 25 assessment indicators. A detailed explanation is provided below:

1. Governance Structure Aspect
   This aspect evaluates the completeness of corporate organs, structures, and infrastructure in accordance with principles, values, and compliance to create value and ensure sustainable, ethical, and dignified growth. The indicators include:
   a. Shareholders & General Meeting of Shareholders (GMS)
   b. Board of Commissioners
   c. Board of Directors
   d. Supporting Organs of Board of Commissioners
   e. Supporting Organs of Board of Directors
   f. Functional Management

2. Governance Process Aspect
   This aspect evaluates management systems that optimize all management functions in line with changes in the company's environment, as well as principles, values, and compliance, to create value and ensure sustainable, ethical, and dignified growth. The indicators include:
   a. Governance Systems and Mechanisms for Shareholders and GMS
   b. Governance Systems and Mechanisms for Board of Commissioners and Board of Directors
   c. Governance Systems and Mechanisms for Organizational Behavior
   d. Governance Systems and Mechanisms for Disclosure and Transparency
   e. Governance Systems and Mechanisms for Risk Management
   f. Governance Systems and Mechanisms for Compliance
   g. Governance Systems and Mechanisms for Control and Supervision
   h. Governance Systems and Mechanisms for Strategic Planning
   i. Governance Systems and Mechanisms for Organizational Infrastructure
   j. Governance Systems and Mechanisms for Information Technology
   k. Governance Systems and Mechanisms for Sustainable Development Goals
   l. Governance Systems and Mechanisms for Creativity and Innovation
   m. Governance Systems and Mechanisms for Building Corporate Maturity

3. Aspek Hasil Tata Kelola (*Governance Outcome*)
   Aspek ini merupakan penilaian terhadap kinerja perusahaan yang optimal, berhasil guna, dan berdaya guna dengan penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien dalam menciptakan nilai dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan secara etikal dan bermartabat. Secara rinci aspek hasil tata kelola terdiri dari beberapa indikator berikut:
   a. Hasil dari Tata Kelola Organ Perusahaan
   b. Kesesuaian Perilaku Keorganisasian
   c. Hasil dari Tata Kelola Risiko, Kepatuhan, serta Pengendalian dan Pengawasan.
   d. Hasil dari Tata Kelola Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
   e. Hasil dari Tata Kelola Membangun Kematangan Perusahaan

Tahapan penilaian CGPI 2024

Penilaian CGPI 2024 melakukan penilaian terhadap aspek dan indikator penilaian melalui 2 (dua) tahapan penilaian yaitu:

1. Tahapan Analisis
   Tahapan ini dilakukan melalui analisis terhadap aspek dan indikator penilaian CGPI 2022 melalui metode:
   a. Pengisian Kuesioner *Self Assessment*
   b. Penilaian Sistem Dokumentasi

2. Tahapan Observasi
   Tahapan ini merupakan klasifikasi terhadap hasil yang diperoleh dari tahapan analisis di atas melalui metode diskusi tanya jawab Tim Observer CGPI bersama Organ Perusahaan.

PIHAK YANG MELAKUKAN ASSESSMENT

Pihak yang melakukan penilaian CGPI yaitu The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG).

HASIL PENILAIAN

Pelindo dalam Program Riset dan Pemeringkatan Corporate Governance Perception Index (CGPI) 2024 memperoleh capaian nilai sebesar 85,46 Berdasarkan kategori pemeringkatan nilai CGPI 2024, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) memiliki nilai yang termasuk dalam predikat “Sangat Terpercaya”. Rincian nilai untuk setiap aspek penilaian CGPI 2024 yang dicapai PT Pelabuhan Indonesia (Persero) adalah sebagai berikut:

1. Aspek Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*) memperoleh nilai 23,11 dari nilai maksimum 33,33 atau pencapaian 85,39%.
2. Aspek Proses Tata Kelola (*Governance Process*) memperoleh nilai 31,33 dari nilai maksimum 33,34 atau pencapaian 85,69%.
3. Aspek Hasil Tata Kelola (*Governance Outcome*) memperoleh nilai 31,02 dari nilai maksimum 33,33 atau pencapaian 85,28%.

3. Governance Outcome Aspect
   This aspect evaluates the company’s performance in achieving optimal, effective, and efficient results through the use of resources to create value and ensure sustainable, ethical, and dignified growth. The indicators include:
   a. Outcomes of Corporate Governance of Company Organs
   b. Alignment of Organizational Behavior
   c. Outcomes of Risk, Compliance, Control, and Supervision Governance
   d. Outcomes of Sustainable Development Goals Governance
   e. Outcomes of Corporate Maturity Development Governance

2024 CGPI Assessment Stages

2024 CGPI assessment evaluates the aspects and indicators through two assessment stages:

1. Analysis Stage
   This stage is conducted through an analysis of 2022 CGPI assessment aspects and indicators using the following methods:
   a. Self-Assessment Questionnaire
   b. Documentation System Assessment

2. Observation Stage
   This stage classifies the results obtained from the analysis stage above through a question-and-answer discussion method between the CGPI Observer Team and the Company’s Organs.

ASSESSOR

The CGPI assessment is conducted by The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG).

ASSESSMENT RESULTS

Pelindo achieved a score of 85.46 in the 2024 Corporate Governance Perception Index (CGPI) Research and Ranking Program. Based on the 2024 CGPI rating category, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) achieved a score within the “Highly Trusted” category. The breakdown of scores for each aspect of the 2024 CGPI assessment achieved by PT Pelabuhan Indonesia (Persero) is as follows:

1. Governance Structure aspect scored 23.11 out of a maximum score of 33.33, or an achievement of 85.39%.
2. Governance Process aspect scored 31.33 out of a maximum score of 33.34, or an achievement of 85.69%.
3. Governance Outcome aspect scored 31.02 out of a maximum score of 33.33, or an achievement of 85.28%.

Hasil CGPI 2024 yang diperoleh Pelindo dengan predikat "Sangat Terpercaya" tersebut menggambarkan bahwa organ perusahaan dan segenap anggota perusahaan Pelindo telah berkomitmen dan konsisten dalam mengimplementasikan prinsip dan sistem tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*/ GCG). Pelindo juga telah membangun sistem manajemen yang optimal, berkualitas dan bermutu tinggi dengan pemanfaatan sumber daya yang efektif dan efisien, sesuai prinsip, nilai dan kepatuhan GCG. Dengan demikian Pelindo dapat menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* dan pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan secara etikal dan bermartabat.

The 2024 CGPI results obtained by Pelindo with the predicate "Highly Trusted" reflect that the corporate organs and all members of Pelindo are committed and consistent in implementing good corporate governance (GCG) principles and systems. Pelindo has also established an optimal, high-quality, and robust management system by utilizing resources effectively and efficiently, in accordance with GCG principles, values, and compliance. Accordingly, Pelindo can create added value for stakeholders and achieve sustainable corporate growth ethically and with dignity.

Adapun rincian penilaian adalah sebagai berikut:

The assessment details are as follows:

No	Indikator Indicator	Nilai Rerata Average Score	Pemenuhan Fulfillment	Kategori Category
I	**Aspek Struktur Governansi (Governance Structure)** **Governance Structure Aspects**	**23,11**	**85,39%**	**Sangat Baik** **Very Good**
1	Pemegang Saham dan RUPS Shareholders and GMS	23,17	85,61%	Sangat Baik Very Good
2	Dewan Komisaris Board of Commissioners	23,01	84,99%	Baik Good
3	Direksi Board of Directors	23,24	86,24%	Sangat Baik Very Good
4	Organ Pendukung Dewan Komisaris Board of Commissioners Supporting Organs	22,88	84,53%	Baik Good
5	Organ Kelengkapan Direksi Board of Directors Supporting Organs	23,23	85,81%	Sangat Baik Very Good
6	Manajemen Fungsional Functional Management	23,05	85,16%	Sangat Baik Very Good
II	**Aspek Proses Governansi (Governance Process)** **Governance Process Aspects**	**31,33**	**85,69%**	**Sangat Baik** **Very Good**

No	Indikator Indicator	Nilai Rerata Average Score	Pemenuhan Fulfillment	Kategori Category
1	Mekanisme Governansi Pemegang Saham dan RUPS Shareholder and GMS Governance Mechanisms	31,98	87,48	Sangat Baik Very Good
2	Mekanisme Governansi Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors Governance Mechanisms	31,46	86,05%	Sangat Baik Very Good
3	Mekanisme Governansi Perilaku Keorganisasian Organizational Behavior Governance Mechanisms	31,70	86,69%	Sangat Baik Very Good
4	Mekanisme Governansi Pengungkapan dan Keterbukaan Informasi Disclosure and Information Disclosure Governance Mechanisms	31,66	86,58%	Sangat Baik Very Good
5	Mekanisme Governansi Risiko Risk Governance Mechanisms	31,43	85,98%	Sangat Baik Very Good
6	Mekanisme Governansi Kepatuhan Compliance Governance Mechanisms	31,19	85,305	Sangat Baik Very Good
7	Mekanisme Governansi Pengendalian Internal Internal Control Governance Mechanisms	31,12	85,11%	Sangat Baik Very Good
8	Mekanisme Governansi Pengawasan Internal dan Eksternal Internal and External Oversight Governance Mechanisms	31,54	86,26%	Sangat Baik Very Good
9	Mekanisme Governansi Perencanaan Strategis Strategic Planning Governance Mechanisms	31,10	85,06%	Sangat Baik Very Good
10	Mekanisme Governansi Sumber Daya Korporasisi Corporate Resource Governance Mechanisms	30,99	84,78%	Baik Good
11	Mekanisme Governansi Tujuan Pembangungan Berkelanjutan Sustainable Development Goals Governance Mechanisms	31,27	85,52%	Sangat Baik Very Good
12	Mekanisme Governansi Kreativitas dan Inovasi Creativity and Innovation Governance Mechanisms	30,99	84,76%	Baik Good
13	Mekanisme Governansi Membangun Kapabilitas Dinamis Perusahaan Governance Mechanisms for Building Dynamic Company Capabilities	30,87%	84,45%	Baik Good
III	**Aspek Hasil Governansi (Governance Outcome)** **Governance Outcomes Aspects**	**31,02**	**85,28%**	**Sangat Baik** **Very Good**
1	Hasil Governansi Organ Perusahaan Governance Outcome of Corporate Organs	31,23	85,87	Sangat Baik Very Good
2	Hasil Governansi Kesesuaian Perilaku Keorganisasian Governance Outcome of Organizational Behavior Compliance	30,93	85,04%	Sangat Baik Very Good
3	Hasil Governansi Pengungkapan dan Keterbukaan Governance Outcome of Disclosure and Transparency	31,49	86,57%	Sangat Baik Very Good
4	Hasil Governansi Risiko, Kepatuhan, Pengendalian dan Pengawasan. Governance Outcome for Risk, Compliance, Control, and Oversight.	30,67	84,34%	Baik Good
5	Hasil Governansi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Governance Outcome for Sustainable Development Goals	31,04	85,36%	Sangat Baik Very Good
6	Hasil Governansi Membangun Kapabilitas Dinamis Perusahaan Governance Outcome for Building Dynamic Company Capabilities	30,73	84,50%	Baik Good
	NILAI CGPI 2024 2024 CGPI SCORE	85,46	SANGAT TERPERCAYA HIGHLY TRUSTED	

REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUTNYA RECOMMENDATIONs AND FOLLOW UP

Rekomendasi Recommendation	**Tindak Lanjut** Follow-up
Aspek Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*) Governance Structure Aspects	
Pelindo perlu mengoptimalkan kebijakan dan program pengembangan kepemimpinan di perusahaan untuk memastikan ketersediaan calon pemimpin perusahaan yang kompeten, kompetitif, adaptif dan lincah dalam menghadapi dinamika perubahan secara berkelanjutan. Pelindo needs to optimize its leadership development policies and programs to ensure the availability of competent, competitive, adaptive, and agile future leaders to sustainably navigate the dynamics of change.	Telah ditindaklanjut Has been followed up
Pelindo perlu memperkuat pengembangan kompetensi Direksi melalui pelatihan dan pembelajaran berkelanjutan berbasis kepemimpinan lincah (*agile leadership*), sehingga Direksi memiliki pengetahuan relevan, kepemimpinan adaptif, serta kapasitas untuk merespon tantangan dan mengambil keputusan strategis dalam menghadapi dinamika bisnis. Pelindo needs to strengthen the competency development of its Board of Directors through ongoing training and learning based on agile leadership, so that the Board of Directors has relevant knowledge, adaptive leadership, and the capacity to respond to challenges and make strategic decisions in the face of business dynamics.	Telah ditindaklanjut Has been followed up
Pelindo perlu menetapkan rancangan struktur organisasi disesuaikan dengan rencana bisnis perusahaan dan memenuhi kekosongan formasi struktur fungsional yang menjadi tanggung jawab Direksi. Pelindo needs to establish an organizational structure design aligned with the company's business plan and address gaps in functional structure formations under the Board of Directors' responsibility.	Telah ditindaklanjut Has been followed up
Pelindo perlu mengoptimalkan kebijakan tata kelola data yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta mengacu pada praktik terbaik dan diselaraskan dengan rencana strategis Perusahaan. Pelindo needs to optimize its data governance policies, complying with applicable laws and regulations, adhering to best practices, and aligning them with the company's strategic plan.	Telah ditindaklanjut Has been followed up
Pelindo perlu melakukan pemutakhiran kebijakan dan strategi Perusahaan secara berkala melalui analisis berbasis risiko yang komprehensif berkaitan dengan dinamika lingkungan bisnis dan industri agar dapat mengoptimalkan potensi perusahaan. Pelindo needs to regularly update its policies and strategies through comprehensive risk-based analysis related to the dynamics of the business and industry environment to maximize the company's potential.	Telah ditindaklanjut Has been followed up
Aspek Proses Tata Kelola (*Governance Process*) Governance Process Aspects	
Pelindo perlu mengembangkan roadmap tata Kelola Perusahaan secara terintegrasi dengan Grup Perusahaan agar pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Terintegrasi berjalan selaras dengan Rencana Strategis Perusahaan. Pelindo needs to develop an integrated Corporate Governance roadmap within its Group of Companies to ensure that Integrated Corporate Governance is aligned with the Company's Strategic Plan.	Telah ditindaklanjut Has been followed up
Pelindo perlu memperkuat penerapan pedoman etika di seluruh lini agar terhindar dari perilaku menyimpang dan lebih tangguh menghadapi perubahan eksternal, sehingga integritas dan keberlanjutan bisnis tetap terjaga. Pelindo needs to strengthen the implementation of ethical guidelines across all levels to avoid deviant behavior and become more resilient in the face of external changes, thereby maintaining business integrity and sustainability.	Telah ditindaklanjut Has been followed up
Pelindo perlu memperkuat budaya risiko terhadap emerging risk, secara kolektif dan terintegrasi dengan sistem manajemen risiko perusahaan, yang mendorong perusahaan menjadi lebih cepat mendeteksi, lebih terbuka dalam komunikasi, dan lebih adaptif merespons ketidakpastian, sehingga menopang kinerja unggul dan pertumbuhan berkelanjutan. Pelindo needs to strengthen its risk culture regarding emerging risks, collectively and integrated with the company's risk management system, encouraging the company to be more agile in detecting, more open in communicating, and more adaptive in responding to uncertainty, thus supporting superior performance and sustainable growth.	Telah ditindaklanjut Has been followed up
Pelindo perlu mengoptimalkan sistem dan mekanisme keberlanjutan bisnis di perusahaan (*Business Continuity Management*) sehingga perusahaan menjadi lebih cepat mendeteksi, lebih adaptif merespons, dan lebih resilien menghadapi ketidakpastian, sehingga kinerja dan pertumbuhan berkelanjutan dapat terjaga. Pelindo needs to optimize its business continuity management systems and mechanisms so that the company is more agile in detecting, more adaptive in responding, and more resilient in the face of uncertainty, thereby maintaining sustainable performance and growth.	Telah ditindaklanjut Has been followed up

Rekomendasi Recommendation	**Tindak Lanjut** Follow-up
Pelindo perlu mengembangkan mitigasi serta perbaikan proses kerja dalam rangka mencegah terjadinya/terulangnya *fraud*, kasus non *fraud*, sanksi/denda, serta pelanggaran lainnya Pelindo needs to develop mitigation measures and improve work processes to prevent the occurrence/recurrence of fraud, non-fraud cases, sanctions/fines, and other violations.	Telah ditindaklanjut Has been followed up
Pelindo perlu mengoptimalkan kematangan sistem tata kelola human capital dengan mengintegrasikan pembelajaran yang berkelanjutan (*learning organization*), pengelolaan pengetahuan (*knowledge management*), serta budaya adaptif, yang mendukung kapabilitas dinamis perusahaan dan menjaga pertumbuhan berkelanjutan. *Pelindo needs to optimize the maturity of its human capital governance system by integrating continuous learning (learning organization), knowledge management, and an adaptive culture, which supports the company's dynamic capabilities and maintains sustainable growth.*	Telah ditindaklanjut *Has been followed up*
Pelindo perlu mengembangkan struktur dan sistem terkait perlindungan dan pemberdayaan konsumen yang andal dan melakukan evaluasi Pelaksanaanya secara berkala. *Pelindo needs to develop reliable structures and systems related to consumer protection and empowerment and conduct regular evaluations of their implementation.*	Telah ditindaklanjut *Has been followed up*
Pelindo perlu mengoptimalkan mekanisme identifikasi dan evaluasi berkala atas peluang, ancaman, dan dinamika lingkungan, serta melakukan transformasi bisnis dengan integrasi dan penyesuaian strategi yang cepat, alokasi sumber daya optimal, sehingga perusahaan dapat merespons perubahan secara adaptif dan menciptakan nilai berkelanjutan. Pelindo needs to optimize mechanisms for periodically identifying and evaluating opportunities, threats, and environmental dynamics, and undertake business transformation through rapid strategic integration and adjustment, optimal resource allocation, hence the company can respond adaptively to change and create sustainable value.	Telah ditindaklanjut Has been followed up
Pelindo perlu memperkuat kapabilitas dan kapasitas sumber daya teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas inovasi digital, serta menjaga keamanan dan kepercayaan digital (*digital trust and cyber security*), sehingga perusahaan lebih adaptif menghadapi perubahan dan mampu menjaga kepercayaan *stakeholders* dan pertumbuhan berkelanjutan. Pelindo needs to strengthen its technological resource capabilities and capacity to improve operational efficiency, expand digital innovation, and maintain digital trust and cybersecurity. This will enable the company to be more adaptive to change and maintain stakeholder trust and achieve sustainable growth.	Telah ditindaklanjut Has been followed up
Pelindo perlu mengoptimalkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang terintegrasi secara menyeluruh, dengan sasaran utama mencapai zero accident (nihil kecelakaan kerja) guna meningkatkan reputasi perusahaan, serta menjamin kesejahteraan karyawan sesuai prinsip gcg secara etikal dan bermartabat. Pelindo needs to optimize the Occupational Safety and Health Management System (OHSMS) which is fully integrated, with the main target of achieving zero accidents (zero work accidents) in order to improve the company's reputation, as well as guarantee employee welfare in accordance with GCG principles in an ethical and dignified manner.	
Aspek Hasil Tata Kelola (Governance Outcomes) Governance Outcomes Aspects	
Pelindo perlu memperkuat kapabilitas, kapasitas, dan kompetensi utama perusahaan melalui implementasi strategi yang adaptif, tangkas, dan efisien, guna mendukung pertumbuhan berkelanjutan, memperkokoh posisi pasar, serta menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Pelindo needs to strengthen the company's capabilities, capacities, and core competencies through the implementation of adaptive, agile, and efficient strategies to support sustainable growth, strengthen its market position, and create added value for all stakeholders.	Telah ditindaklanjut Has been followed up
Pelindo perlu meningkatkan pertumbuhan nilai untuk Pemegang Saham melalui peningkatan dividen secara konsisten dan proporsional bagi seluruh Pemegang Saham Pelindo needs to increase shareholder value growth by consistently and proportionally increasing dividends for all shareholders.	Telah ditindaklanjut Has been followed up

Rekomendasi Recommendation	**Tindak Lanjut** Follow-up
Pelindo perlu memastikan hasil kinerja dicapai melalui efisiensi operasional, peningkatan kualitas produk/jasa dengan standar mutu tinggi serta inovasi berkelanjutan, dan pengukuran kinerja yang jelas, berbasis data, serta terintegrasi dengan strategi bisnis Pelindo needs to ensure performance results are achieved through operational efficiency, improving product/service quality to high standards and continuous innovation, and through clear, data-driven performance measurement integrated with business strategy.	Telah ditindaklanjut Has been followed up
Pelindo perlu mengoptimalkan penciptaan nilai yang berorientasi pada pelanggan dan stakeholder, melampaui sekadar output, dengan memastikan setiap strategi, produk, dan layanan berkontribusi pada keberlanjutan nilai perusahaan serta kepuasan pemangku kepentingan. Pelindo needs to optimize customer- and stakeholder-oriented value creation, going beyond mere output, by ensuring that every strategy, product, and service contributes to the company's sustainable value and stakeholder satisfaction.	Telah ditindaklanjut Has been followed up
Pelindo perlu mengoptimalkan capaian kinerja yang relevan dengan strategi bisnis, sekaligus berkontribusi nyata bagi komunitas melalui praktik sosial yang inklusif, keberlanjutan lingkungan yang terintegrasi, serta penerapan etika bisnis yang kuat dan konsisten Pelindo needs to optimize performance achievements relevant to its business strategy, while making a real contribution to the community through inclusive social practices, integrated environmental sustainability, and the implementation of strong and consistent business ethics.	Telah ditindaklanjut Has been followed up
Pelindo perlu mendorong capaian inovasi bisnis terbaik yang mencakup produk, layanan, proses, fungsi pendukung, kinerja organisasi, dan strategi, sehingga mampu memperkuat keunggulan bersaing, meningkatkan daya saing industri, serta memastikan keberlanjutan nilai perusahaan Pelindo needs to encourage the best business innovation achievements, encompassing products, services, processes, support functions, organizational performance, and strategy, thereby strengthening its competitive advantage, enhancing industrial competitiveness, and ensuring the sustainability of the company's value.	Telah ditindaklanjut Has been followed up
Pelindo perlu melakukan penanganan secara progresif atas seluruh perkara hukum yang sedang dihadapi dan mengupayakan mitigasi risiko yang optimal atas seluruh gugatan hukum, serta memperkuat sistem pencegahan agar tidak terjadi kembali, sehingga keberlangsungan dan reputasi perusahaan tetap terjaga. Pelindo needs to progressively handle all ongoing legal cases and strive for optimal risk mitigation for all lawsuits, as well as strengthen its prevention system to prevent recurrence, thereby maintaining the company's sustainability and reputation.	Telah ditindaklanjut Has been followed up

PELINDO
INDONESIA MARITIME GATEWAY

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)

Social and Environmental Responsibility Program (CSR)

Pada era globalisasi sekarang ini penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSL) terus mengalami perkembangan. TJSL tersebut bukan hanya untuk kepentingan reputasi Perusahaan semata, namun juga harus mampu menjaga keberlanjutan usaha perusahaan melalui program-program di bidang ekonomi, sosial, maupun lingkungan serta berbasis pelibatan masyarakat dan *stakeholder* perusahaan. Regulasi terkait TJSL diatur dalam beberapa dasar hukum, seperti pada Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terkait komitmen melakukan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Peraturan Pemerintah RI No. 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perseroan Terbatas dan Undang-undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Selain itu, peraturan terkait TJSL dalam lingkup Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. Per-01/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Sebagai BUMN PT Pelabuhan Indonesia (Persero) secara konsisten melaksanakan program TJSL yang mencakup aspek perbaikan tata kelola yang berkelanjutan. Dalam melaksanakan program TJSL, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) mengacu pada pedoman ISO 26000: *Guidance on Social Responsibility* (yang berisi 7 subyek utama) dan mengintegrasikan prinsip *Sustainable Development Goals* (SDGs)/tujuan pembangunan berkelanjutan

In today's era of globalization, the implementation of Corporate Social and Environmental Responsibility (CSR) continues to evolve. CSR is not only for the benefit of a company's reputation but at the same time shall maintain business sustainability through economic, social, and environmental programs, based on community and stakeholder engagement. Regulations related to CSR are outlined in several legal frameworks, such as Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, which stipulates the commitment to Social and Environmental Responsibility (CSR), Government Regulation No. 47 of 2012 concerning Social and Environmental Responsibility (CSR) for Limited Liability Companies, and Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises. Furthermore, regulations related to CSR within State-Owned Enterprises (SOEs) are also outlined in the Minister of SOEs Regulation No. Per-01/MBU/03/2023 dated March 3, 2023, concerning Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs for State-Owned Enterprises. As an SOE, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) consistently carries out CSR programs that encompass the sustainable governance improvement aspect.

PT Pelabuhan Indonesia (Persero)'s CSR programs refer to the ISO 26000: Guidance on Social Responsibility guidelines (which contains seven main subjects) and integrate the principles of Sustainable Development Goals (SDGs), specifically the seven SDG priorities that serve as guidelines for Shareholders. In accordance with Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. Per-01/MBU/03/2023, Article 20, the CSR program is carried out in the form of

(TPB) khususnya 7 prioritas SDGs yang menjadi arahan Pemegang Saham. Sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. Per-01/MBU/03/2023 Pasal 20 Program TJSL dilakukan dalam bentuk Pembiayaan Usaha Mikro & Usaha Kecil (PUMK) serta dalam bentuk bantuan/kegiatan lainnya termasuk pembinaan.

Micro & Small Enterprise Financing (PUMK) and other forms of assistance/activities, including coaching.

Wilayah kerja PT Pelabuhan Indonesia (Persero) meliputi 4 (empat) Regional. Regional 1 yang bertanggungjawab dalam menjalankan program TJSL di 4 (empat) Provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, Riau, dan Kepulauan Riau. Regional 2 yang bertanggungjawab dalam menjalankan program TJSL di 9 (sembilan) Provinsi yaitu Sumatera Barat, Bangka Belitung, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Kalimantan Barat. Regional 3 yang bertanggungjawab dalam menjalankan program TJSL di 7 (tujuh) Provinsi yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Regional 4 yang bertanggungjawab dalam 11 (sebelas) Provinsi yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

PT Pelabuhan Indonesia (Persero)'s working area covers four regions. Regional 1 is responsible for CSR programs in four provinces: Aceh, North Sumatra, Riau, and the Riau Islands. Regional 2 is responsible for CSR programs in nine provinces: West Sumatra, Bangka Belitung, Bengkulu, South Sumatra, Lampung, Banten, DKI Jakarta, West Java, and West Kalimantan. Regional 3 is responsible for CSR programs in seven provinces: East Java, Central Java, South Kalimantan, Central Kalimantan, Bali, West Nusa Tenggara, and East Nusa Tenggara. Regional 4 is responsible for eleven provinces: South Sulawesi, Central Sulawesi, Southeast Sulawesi, North Sulawesi, Gorontalo, East Kalimantan, North Kalimantan, Maluku, North Maluku, Papua, and West Papua.

Susunan pengelola adalah unit kerja perusahaan yang secara struktural berada dibawah Group Head Sekretariat Perusahaan. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-69/MBU/03/2020 tanggal 02 Maret 2020, Berita Acara Kesepakatan Direksi No. UM.339/18/8/3/PI.II-16 tanggal 18 Agustus 2016 dan Surat Keputusan Direksi No. HK.01/12/5/1/PSOG/UTMA/PLND-22, susunan pengelola adalah sebagai berikut:

The management structure consists of work units structurally under the Group Head of Corporate Secretariat. Based on the Decree of Minister of State-Owned Enterprises No. SK-69/MBU/03/2020 dated March 2, 2020, Minutes of Board of Directors' Agreement No. UM.339/18/8/3/PI.II-16 dated August 18, 2016 and Board of Directors' Decree No. HK.01/12/5/1/PSOG/UTMA/PLND-22, the management structure is as follows:

Direktur Utama President Director	:	Arif Suhartono
Direktur SDM & Umum Director of HC & General Affairs	:	Dwi Fatan Lilyana
Group Head Sekretariat Perusahaan Group Head of Corporate Secretary	:	Ali Sodikin
Departemen Head Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Head of Social and Environmental Responsibility Department	:	Ilham Leman
Manager Perencanaan dan Pengelolaan Program Programme Planning and Management Manager	:	Bayu Widyafrasta
Manager Monitoring dan Pelaporan Program Program Monitoring and Reporting Manager	:	Bayu Widyafrasta

Penyusunan Laporan TJSL di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, khususnya Pasal 2 mengenai turut aktif membimbing dan membantu perekonomian golongan lemah, koperasi, dan masyarakat, serta Pasal 88 yang mengatur bahwa sumber pendanaan dapat berasal dari penyisihan laba;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Bab V tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;

The preparation of CSR Report at PT Pelabuhan Indonesia (Persero) is guided by:

1. Law Number 19 of 2003, dated June 19, 2003, concerning State-Owned Enterprises, specifically Article 2 on active participation in guiding and assisting the economy of vulnerable groups, cooperatives, and communities, and Article 88, which stipulates that funding sources can come from profit allocations;
2. Law Number 40 of 2007, dated August 16, 2007, concerning Limited Liability Companies, specifically Chapter V on Social and Environmental Responsibility;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perseroan Terbatas;
4. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
6. Surat Edaran Menteri Negara BUMN Nomor SE-02/MBU/WK/2012 tanggal 23 Februari 2012 tentang Penetapan Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan;
7. Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SE-5/MBU/DSI/03/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Penanggulangan Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) melalui Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
8. Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SE-721/MBU/11/2022 tanggal 10 November 2022 tentang Kerja Sama Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil ("Kerja Sama Program PUMK");
9. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-277/MBU/10/2023 tanggal 4 Oktober 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Piutang dan/atau Pembiayaan Syariah Bermasalah pada Program Usaha Mikro dan Usaha Kecil di BUMN;
10. Surat Deputi Bidang SDM, Teknologi, dan Informasi Kementerian BUMN Nomor S-138/DSI.MBU/10/2024 tanggal 31 Oktober 2024 perihal *Key Performance Indicator* Program TJSL BUMN Tahun 2025;
11. Perjanjian Kerja Sama antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor B.12/MBD/12/2022 dan HL.02/5/12/1/PPLP/SKPR/PLND-22 tanggal 5 Desember 2022 tentang Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

3. Government Regulation Number 47 of 2012 concerning Social and Environmental Responsibility (CSR) of Limited Liability Companies;
4. Presidential Regulation Number 59 of 2017 concerning the Implementation of Sustainable Development Goals;
5. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-01/MBU/03/2023 dated March 3, 2023, concerning Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs for State-Owned Enterprises;
6. Circular Letter of the Minister of State-Owned Enterprises Number SE-02/MBU/WK/2012 dated February 23, 2012, concerning Establishment of Accounting Guidelines for Partnership and Community Development Programs;
7. Circular Letter of the Minister of State-Owned Enterprises Number SE-5/MBU/DSI/03/2020 dated March 17, 2020, concerning Mitigation of the Spread of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) through Social and Environmental Responsibility Activities;
8. Letter of the Minister of State-Owned Enterprises Number SE-721/MBU/11/2022 dated November 10, 2022, concerning Cooperation in Micro and Small Enterprise Funding Program ("PUMK Program Cooperation");
9. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises Number SK-277/MBU/10/2023 dated October 4, 2023, concerning Implementation Guidelines for the Settlement of Problematic Sharia Receivables and/or Financing in Micro and Small Enterprise Program at State-Owned Enterprises;
10. Letter from the Deputy for Human Resources, Technology, and Information of the Ministry of State-Owned Enterprises Number S-138/DSI.MBU/10/2024 dated October 31, 2024, concerning Key Performance Indicators for the 2025 SOE Social and Environmental Responsibility (CSR) Program;
11. Cooperation Agreement between PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. and PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Number B.12/MBD/12/2022 and HL.02/5/12/1/PPLP/SKPR/PLND-22 dated December 5, 2022, concerning the Implementation of Micro and Small Enterprise Funding Program.

Kinerja Program Tjsl
CSR Program Performance

PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)

REALISASI PROGRAM PENDANAAN UMK (PUMK)

Program PUMK Tahun 2025 sesuai arahan sebagaimana Surat Menteri BUMN dianggarkan untuk dilaksanakan melalui kerjasama Kolaborasi dengan PT Bank BRI (Persero) pada Tahun 2024 sebesar Rp13,44 miliar. Sesuai dengan Surat Pemindahbukuan Nomor: TL.02/30/12/2/PPLP/SDMA/PLND-25 tanggal 30 Desember 2025, bahwa Laporan Penyaluran PUMK tahun 2025 melalui BRI, sebagai berikut:

MICRO AND SMALL ENTERPRISE FUNDING PROGRAM (PUMK)

REALIZED MSE FUNDING PROGRAM (PUMK)

The 2025 PUMK Program, as directed by the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs), was budgeted to be implemented through a collaborative partnership with PT Bank BRI (Persero) in 2024, amounting to Rp13.44 billion. According to Transfer Letter Number: TL.02/30/12/2/PPLP/SDMA/PLND-25 dated December 30, 2025, the 2025 PUMK Distribution Report through BRI is as follows:

Tabel Penyaluran PUMK
PUMK Distribution

(dalam Rupiah)
(in Rupiah)

Uraian Description	Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 Period ending December 31, 2025	Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 Period ending December 31, 2024
Distribusi Dana Fund Distribution		
Jumlah dana yang disalurkan Amount of Funds Distributed	**13.442.603.041**	18.376.761.086
Jumlah distribusi dana Amount of Funds Distributed	**13.442.603.041**	18.376.761.086

RINCIAN DANA PROGRAM PUMK

Dana Program PUMK berasal dari dana bergulir Program PUMK. Sampai 31 Desember 2025, dana Program PUMK yang tersedia sebesar Rp20.280.691.518 dengan rincian sebagai berikut:

DETAILS OF PUMK PROGRAM FUNDS

The PUMK Program funds are derived from PUMK Program revolving fund. As of December 31, 2025, available PUMK Program funds amount to Rp20,280,691,518, with the following breakdown:

Tabel Rincian Dana Program PUMK
Details of PUMK Program Funds

(dalam Rupiah)
(in Rupiah)

Uraian Description	Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 Period ending December 31, 2025	Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 Period ending December 31, 2024
Dana yang tersedia Available Funds		
Saldo Awal Beginning Balance	**17.299.092.541**	25.032.696.420

Tabel Rincian Dana Program PUMK
Details of PUMK Program Funds

(dalam Rupiah)
(in Rupiah)

Uraian Description	**Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025** Period ending December 31, 2025	**Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024** Period ending December 31, 2024
Pengembalian Pinjaman Mitra Binaan Fostered Partner Loan Repayments	**2.625.695.328**	3.297.745.456
Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman Loan Administration Fee Income	**147.925.585**	206.236.666
Penerimaan Jasa Administrasi Bank Bank Administration Fee Income	**204.371.754**	(171.086.479)
Kelebihan Pembayaran Angsuran Increase in Installment Payments	**-**	244.521.771
Pendapatan Lain Other Income	**3.606.310**	3.241.406.348
Jumlah dana yang tersedia Available Funds	**20.280.691.518**	31.851.520.182

PROGRAM TJSL BANTUAN DAN/ ATAU KEGIATAN LAINNYA (NON PUMK)

REALISASI PROGRAM KERJA

Sumber dana Program TJSL CID dan/atau Kegiatan Lainnya berasal dari anggaran yang dibiayakan pada Perusahaan. Pelaksanaan Program TJSL CID dan/ atau Kegiatan Lainnya Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp126,17 miliar atau 103,39% dari anggaran Tahun 2025, atau dibandingkan dengan anggaran periode yang sama sebesar Rp122,24 miliar atau 103,39%, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

SOCIAL AND ENVIRONMENTAL ASSISTANCE PROGRAM AND/OR OTHER ACTIVITIES (NON-PUMK)

WORK PROGRAM REALIZATION

Funding for the CID CSR Program and/or Other Activities comes from the Company's budget. The realization of CID CSR Program and/or Other Activities in 2025 amounted to Rp126.17 billion, or 103.39% of the 2025 budget, compared to the budget for the same period of Rp122.24 billion, or 103.39%, as shown in the following table:

Program Program	**Realisasi Tahun 2024** 2024 Realization	**RKA 2025**	**Realisasi Tahun 2025** 2025 Realization	**Presentasi Capaian (%)** Percentage of Achievement (%)	
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
Bantuan dan/atau Kegiatan Lainnya Assistance and/or Other Activities	122.242.184.835	122.037.000.00	126.175.245.110	103,22	103,39

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)

Pelaksanaan program berdasarkan TPB dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) pilar sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)

Program implementation based on the SDGs can be grouped into four pillars, as shown in the following table:

Tabel TPB
SDGs

(dalam Rupiah)
(in Rupiah)

Pilar Pillar	Realisasi Tahun 2024 2024 Realization	RKA 2025	Realisasi Tahun 2025 2025 Realization	Presentasi Capaian Percentage of Achievement	
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
Sosial Social	52.872.457.633	**45.714.000.000**	**58.363.998.879**	110,39	127,67
Ekonomi Economy	25.952.115.803	**25.205.000.000**	**19.089.588.295**	73,56	75,74
Lingkungan Environment	40.208.725.678	**48.560.500.000**	**45.506.329.241**	113,18	93,71
Hukum & Tata Kelola Law & Governance	3.208.885.721	**2.557.500.000**	**3.215.328.695**	100,20	125,72
Total Total	**122.242.184.835**	**122.037.000.000**	**126.175.245.110**	**103,22**	**103,39**

PROGRAM *CREATING SHARED VALUE* (CSV)

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang menciptakan nilai tambah bagi Perseroan yang terkait dengan bisnis inti atau *Creating Shared Value* (CSV) adalah bentuk strategi Perusahaan untuk menciptakan nilai ekonomi dan sosial secara bersamaan untuk kepentingan masyarakat maupun bisnis Perusahaan. Adapun rincian pelaksanaan Program CSV sebagai berikut:

CREATING SHARED VALUE (CSV) PROGRAM

The Social and Environmental Responsibility (CSR) program, which creates added value for the Company related to its core business, is a form of the Company's strategy to simultaneously create economic and social value for the benefit of both the community and the Company's business. The details of the CSV Program implementation are as follows:

Tabel Rincian Pelaksanaan Program CSV
Details of CSV Program Implementation

(dalam Rupiah)
(in Rupiah)

No	Program CSV CSV Program	RKA 2025	Realisasi Tahun 2025 2025 Realization	Nilai Manfat CSV bagi Perusahaan CSV Benefits for the Company
1	Program *Carbon Village* (CSV) Carbon Village Program (CSV)	7.450.000.000	8.242.591.635	Program pemberdayaan desa binaan perusahaan untuk mendorong komoditi ekspor dan mendukung port tourism melalui peningkatan kapasitas produksi desa, konserbasi lingkungan dan menghitung karbon. A company-managed village empowerment program to promote export commodities and support port tourism by increasing village production capacity, environmental conservation, and carbon calculation.
2	Program Pelindo Lestari Pelindo Lestari Program	6.350.500.000	5.247.498.014	Program rehabilitasi wilayah pesisir dan laut serta konservasi *biodiversity* untuk penurunan emisi mendukung *green port* dan *blue carbon*. Coastal and marine rehabilitation and biodiversity conservation programs to reduce emissions support green ports and blue carbon.
3	Program TJSL Pada Proyek Strategis (CSV) Program CSR Program for Strategic Projects (CSV)	1.100.000.000	1.507.761.126	Program sosial kemasyarakatan untuk memitigasi dampak sosial proyek pengembangan pelabuhan dan mendapatkan *license to operate* dari Masyarakat. Social community programs to mitigate the social impacts of port development projects and obtain licenses to operate from the community.
Total Total		**14.855.500.000**	**14.997.850.775**	

PROGRAM PRIORITAS/UNGGULAN

Program *Creating Shared Value* (CSV) dan Program Prioritas/Unggulan Penyaluran Program TJSL yang sejalan dengan program prioritas/unggulan yang mendukung pencapaian TPB. Program tiga bidang prioritas terealisasi sebesar Rp72.103.617.418 atau 71,73% dari RKA tahun 2025 sebesar Rp100.526.435.000 dengan rincian antara lain:

PRIORITY/FLAGDHIP PROGRAMS

The Creating Shared Value (CSV) Program and the Priority/Flagship Program for the Distribution of CSR Program align with the priority/flagdhip programs that support the achievement of SDGs. The three priority areas achieved Rp72,103,617,418, or 71.73% of the 2025 RKA of Rp100,526,435,000, with the following details:

No.	Program Unggulan/Prioritas Priority/Flagship Programs	TPB SDG	RKA 2025	Realisasi Tahun 2025 2025 Realization
1	Dukungan Nasional Pendidikan National Education Support	4	5.000.000.000	4.155.933.000
2	Program Beasiswa dan Riset Pelindo Juara Pelindo Juara Scholarship and Research Program	4	4.900.000.000	2.749.488.000
3	Program Penunjang Pendidikan Education Support Program	4	2.900.000.000	13.977.374.701
4	Program Bantuan Sarana Pendidikan Educational Facilities Assistance Program	4	1.700.000.000	2.403.830.877
5	Program Pelindo Mengajar Pelindo Mengajar Program	4	3.967.000.000	2.535.813.260
6	Program Sahabat Inspiratif Pelindo (SIP) Sahabat Inspiratif Pelindo (SIP) Program	10	1.650.000.000	1.351.099.870
7	Penyelenggaraan Seminar dan Workshop TJSL CSR Seminars and Workshops	16	557.500.000	981.082.695
8	Pelatihan dan Sertifikasi TJSL CSR Training and Certification	16	600.000.000	688.723.464
9	Perhitungan Dampak dan Publikasi TJSL CSR Impact Assessment and Publication	16	1.400.000.000	1.545.522.536
Total Total				**30.388.868.403**

No	Program Unggulan/Prioritas Priority/Flagship Programs	TPB SDG	RKA 2025	Realisasi Tahun 2025 2025 Realization
1	Program Dukungan Pembangunan Sosial Social Development Support Program	11	16.800.000.000	10.354.608.750
2	Program Pengelolaan Sampah Terpadu Integrated Waste Management Program	12	2.850.000.000	3.502.267.987
3	Program Carbon *Village* Pelindo (CSV) Pelindo Carbon Village Program (CSV)	14	7.450.000.000	8.242.591.635
4	Program Pelindo Lestari (CSV) Pelindo Lestari Program (CSV)	15	6.305.500.000	5.247.498.014
5	Program Pelindo Communitree Pelindo Communitree Program	13	4.100.000.000	2.270.989.587
Total Total				**29.617.955.973**

No	Program Unggulan/Prioritas Priority/Flagship Programs	TPB SDG	RKA 2025	Realisasi Tahun 2025 2025 Realization
1	*Program Maritimepreneur* Maritimepreneur Program	8	3.505.000.000	3.399.502.085
2	*Program Akselerator UMK* MSME Accelerator Program	8	6.550.000.000	6.246.165.052
3	*Program Gedor Ekspor* Gedor Ekspor Program	8	4.300.000.000	2.009.600.280
4	*Program Teman Nelayan* Teman Nelayan Program	9	3.100.000.000	1.347.043.882
5	*Program Dukungan Pembangunan Ekonomi* Economic Development Support Program	9	5.000.000.000	3.228.416.000
Total Total				**16.230.727.299**

PROGRAM PEMBINAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (UMK)

Program Pembinaan UMK dilaksanakan melalui Program Pengembangan Ekonomi dan UMK untuk mendukung Program Pendanaan UMK melalui beberapa sub program antara lain Program Maritimepreneur, Program Akselerator UMK serta Program Gedor Ekspor. Program ini dilaksanakan menggunakan anggaran yang dibiayakan pada perusahaan dan merupakan bagian dari Program TJSL Bantuan dan/Kegiatan Lainnya.Pameran Pada Pelindo Forum.

1. Pameran Natal bersama KBUMN
   Pelaksanaan : 20 Januari 2025
   Lokasi : Jakarta Convention Center
   Mitra Binaan :
   a. Local Pride Spot
2. Pameran UMK di Pelindo Forum
   Pelaksanaan : 21-23 Januari 2025
   Lokasi : PMLI. Bogor
   Mitra Binaan :
   a. Local Pride Spot

3. Pameran *Inacraft* 2025
   Pelaksanaan : 5-9 Feb 2025
   Lokasi : Jakarta Convention Center (JCC)
   Mitra Binaan :
   a. Neu Men
   b. Alrafi
   c. Nara's Beads
   d. Art In Heart
   e. Rosita Batik Shibori
   f. Winddam
   g. Batik Saputri
   h. Tenun Alus Indonesia
   i. Ciomy
   j. My Little Dimsum
   k. Azk Food

MICRO AND SMALL ENTERPRISES (MSE) MENTORING PROGRAM

The MSE Mentoring Program is carried out through the Economic and MSE Development Program to support MSE Funding Program through several sub-programs, including Maritimepreneur Program, MSE Accelerator Program, and Gedor Ekspor Program. This program is done using a company-funded budget and is part of the CSR Assistance and/or Other Activities Program. Exhibition at Pelindo Forum.

1. Christmas Exhibition with Ministry of SOE
   Date : January 20, 2025
   Location : Jakarta Convention Center
   Fostered Partners:
   a. Local Pride Spot
2. MSE Exhibition at Pelindo Forum
   Date : January 21-23, 2025
   Location: PMLI, Bogor
   Fostered Partners :
   a. Local Pride Spot

3. Inacraft 2025 Exhibition
   Date : February 5-9, 2025
   Location : Jakarta Convention Center (JCC)
   Fostered Partners :
   a. Neu Men
   b. Alrafi
   c. Nara's Beads
   d. Art In Heart
   e. Rosita Batik Shibori
   f. Winddam
   g. Batik Saputri
   h. Tenun Alus Indonesia
   i. Ciomy
   j. My Little Dimsum
   k. Azk Food

4. Pameran Muffest 2025
   Pelaksanaan : 20-23 Februari 2025
   Lokasi : Jakarta Convention Center
   Mitra Binaan :
   a. Khimar Syari
   b. Renata Label
   c. Netaly
   d. Marra Indonesia
   e. Nanina
   f. Neu Men
   g. Javabia
   h. Nara's Beads
   i. Alrafi
   j. Kayo
   k. Tamariska
   l. Rasyid Alam

5. Pameran Hijabfest
   Pelaksanaan : 20-23 Maret 2023
   Lokasi : Sabuga Bandung
   Mitra Binaan :
   a. Marra Indonesia
   b. Netaly
   c. Renata
   d. Javabia
   e. Keiz Hijab

6. Program Pelatihan Dasar Bahasa Inggris
   Pelaksanaan : Mei 2925
   Lokasi : Online
   Mitra Binaan :
   a. 110 Mitra Binaan

7. Bantuan Kapasitas Bahan Baku Kepada Zhafran Batik
   Pelaksanaan : 30 April 2025
   Lokasi : Thamrin City
   Mitra Binaan :
   a. Zhafran Batik
8. Program Pelatihan *Short Course Basic*: Garment La Sallee
   Pelaksanaan : 5 Juni 2025
   Lokasi : LaSalle College Jakarta
   Mitra Binaan :
   a. Neu Men
   b. Netally
   c. Marra Indonesia
   d. Javabia
   e. Nanina
   f. Renata
   g. Tiara Queen
   h. Gusbaesaikung
   i. Klambi Abite
   j. Alshad Indonesia
   k. Alrafi
   l. Nila Hibali
   m. Sadina
   n. Kayla
   o. Batik Nusantara

4. Muffest 2025 Exhibition
   Date: February 20-23, 2025
   Location : Jakarta Convention Center
   Fostered Partners:
   a. Khimar Syari
   b. Renata Label
   c. Netaly
   d. Marra Indonesia
   e. Nanina
   f. Neu Men
   g. Javabia
   h. Nara's Beads
   i. Alrafi
   j. Kayo
   k. Tamarisk
   l. Rasyid Alam

5. Hijabfest Exhibition
   Date : March 20-23, 2023
   Location : Sabuga, Bandung
   Fostered Partners :
   a. Marra Indonesia
   b. Netaly
   c. Renata
   d. Javabia
   e. Keiz Hijab

6. Basic English Training Program
   Date : May 29, 2025
   Location : Online
   Fostered Partners:
   a. 110 Fostered Partners

7. Raw Material Capacity Assistance to Zhafran Batik
   Date : April 30, 2025
   Location : Thamrin City
   Fostered Partners :
   a. Zhafran Batik
8. Short Course Basic Training Program: Garment La Sallee
   Date : June 5 2025
   Location : LaSalle College Jakarta
   Fostered Partners:
   a. Neu Men
   b. Netally
   c. Marra Indonesia
   d. Javabia
   e. Nanina
   f. Renata
   g. Tiara Queen
   h. Gusbaesaikung
   i. Klambi Abite
   j. Alshad Indonesia
   k. Alrafi
   l. Hibali Tilapia
   m. Sadina
   n. Kayla
   o. Archipelago Batik

p. Tunik Putri
q. Riza Bordir
r. Ikoot

9. Keikutsertaan Pameran *Canadian Healthy Food Festival*
   Pelaksanaan : 26 – 27 April 2025
   Lokasi : Vancouver, Kanada
   Mitra Binaan :
   a. 1. CV Agradaya Indonesia

10. *Seremony House of Handycraft*
    Pelaksanaan : 16 Mei 2025
    Lokasi : Tokyo. Jepang
    Mitra Binaan :
    a. Selesa Handicraft
    b. Keu Bali
    c. Oemanka
    d. Keboen Keyang Pottery
    e. Namira
    f. D'Stories
    g. Winddar
    h. Rejutarie
    i. Emma Little Things

11. Pelatihan Pengembangan PUMK Kolaborasi di Tapanuli Tengah
    Pelaksanaan : 18 Juli 2025
    Lokasi : Hotel Pindan, Tapanuli Tengah
    Peserta :
    a. 50 Mitra Binaan

12. Pameran Tokyo *Gift Show*
    Pelaksanaan : 3-5 September 2025
    Lokasi : Tokyo Big Sight, Jepang
    Peserta :
    a. Emma Little Things
13. Pameran *Who is Next*, Paris
    Pelaksanaan : 6-8 September 2025
    Lokasi : Paris
    Peserta :
    a. Rosita Batik Shibori

14. Pameran China Expo
    Pelaksanaan : 17-21 September 2025
    Lokasi : Nanning, China
    Peserta :
    a. Neu Men
    b. Kaubali
    c. Selesa Handycraft
    d. Domba Coffee

p. Princess Tunic
q. Riza Embroidery
r. Ikoot

9. Participation in the Canadian Healthy Food Festival Exhibition
   Date : 26 – 27 April 2025
   Location : Vancouver, Canada
   Fostered Partners :
   a. 1. CV Agradaya Indonesia

10. House of Handicraft Ceremony
    Date : May 16, 2025
    Location : Tokyo, Japan
    Fostered Partners :
    a. Selesa Handicraft
    b. Keu Bali
    c. Oemanka
    d. Keboen Keyang Pottery
    e. Namira
    f. D'Stories
    g. Winddar
    h. Rejutarie
    i. Emma Little Things

11. Collaborative PUMK Development Training in Central Tapanuli
    Date : July 18, 2025
    Location : Hotel Pindan, Central Tapanuli
    Participants :
    a. 50 Fostered Partners

12. Tokyo Gift Show Exhibition
    Date : September 3-5, 2025
    Location : Tokyo Big Sight, Japan
    Participant :
    a. Emma Little Things
13. Who is Next Exhibition, Paris
    Date : September 6-8, 2025
    Location : Paris
    Participant :
    a. Rosita Batik Shibori

14. China Expo Exhibition
    Date : September 17-21, 2025
    Location : Nanning, China
    Participants :
    a. Neu Men
    b. Kaubali
    c. Selesa Handycraft
    d. Domba Coffee

Realisasi Program TJSL Tahun 2025
2025 CSR Program Realization

Realisasi program TJSL tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

The CSR program realization for 2025 is presented as follows:

Tabel Realisasi Program TJSL
Realization of CSR Program

(dalam Rupiah)
(in Rupiah)

No	Nama Program Program Name	TPB SDG	Pilar Pillar	Target Capaian Achievement Target	Lokasi Location	Anggaran Budget	Realisasi Realization
A	**PROGRAM PRIORITAS** PRIORITY PROGRAM						
	BIDANG LINGKUNGAN ENVIRONMENTAL SECTOR						
1	Program Dukungan Pembangunan Nasional Sosial National Social Development Support Program	11	3	Terlaksananya program untuk mendukung pembangunan di daerah dalam bentuk bantuan infrastruktur dan sembako yang berkaitan dengan aspek sosial kemasyarakatan. Implementation of programs to support regional development through infrastructure assistance and basic necessities (food packages) related to social and community aspects.	Pacitan Pacitan	16.800.000.000	10.354.608.750
2	Program Pengelolaan Sampah Terpadu Integrated Waste Management Program	12	3	Terlaksananya pengelolaan sampah terpadu berbasis komunitas. Implementation of community empowerment programs in assisted villages for environmental conservation and carbon accounting.	Kota Makassar, Tangerang, Sleman Makassar City, Tangerang, Sleman	2.850.000.000	3.502.267.987
3	Program Carbon Village (CSV) Carbon Village Program (CSV)	14	3	Terlaksananya pemberdayaan desa binaan untuk konservasi lingkungan dan menghitung karbon. The implementation of empowerment programmes for partner villages aimed at environmental conservation and carbon accounting	Jakarta Barat, Kota Medan West Jakarta, Medan City	7.450.000.000	8.242.591.635
4	Program Pelindo Lestari (CSV) Pelindo Lestari Program (CSV)	15	3	Terlaksananya program rehabilitasi wilayah pesisir untuk mendukung *green port* dan *blue carbon*. Implementation of coastal area rehabilitation programs to support green ports and blue carbon initiatives.	Bandar Lampung, Bengkulu, Berau, Biak Numfor, Kota Makassar, Kota Medan, Tangerang Bandar Lampung, Bengkulu, Berau, Biak Numfor, Makassar City, Medan City, Tangerang	6.305.500.000	5.247.498.014

Tabel Realisasi Program TJSL
Realization of CSR Program

(dalam Rupiah)
(in Rupiah)

No	Nama Program Program Name	TPB SDG	Pilar Pillar	Target Capaian Achievement Target	Lokasi Location	Anggaran Budget	Realisasi Realization
5	Program Pelindo *Communitree* Pelindo Communitree Program	13	3	Terlaksananya program penanaman pohon, reboisasi untuk mendukung *green port*. Implementation of tree planting and reforestation programs to support green port.	Kota Makassar, Kota Surabaya Makassar City, Surabaya City	4.100.000.000	2.270.989.587
	BIDANG PENDIDIKAN EDUCATIONAL SECTOR						
6	Program Dukungan Nasional Pendidikan National Education Support Program	4	1	Penyaluran TJSL atas penugasan dari Kementerian BUMN untuk Program Dukungan Pembangunan Nasional di bidang Pendidikan. Distribution of CSR funds based on assignments from the Ministry of State-Owned Enterprises for National Development Support Programs in the education sector.	Kota Jakarta Jakarta City	5.000.000.000	4.155.933.000
7	Program Penunjang Pendidikan Education Support Program	4	1	Terlaksananya program pendidikan non formal kejar paket dan pelatihan keterampilan. Implementation of non-formal education programs (equivalency education) and skills training.	Bekasi, Gowa, Jakarta, Makassar, Medan, Palembang, Sleman Bekasi, Gowa, Jakarta, Makassar, Medan, Palembang, Sleman	2.900.000.000	13.977.374.701
8	Program Bantuan Sarana Pendidikan Educational Facilities Assistance Program	4	1	Terlaksananya program bantuan sarana pendidikan. Implementation of educational facility assistance programs.	Bogor, Cilacap, Jakarta, Jepara, Sibolga, Medan, Kota Kupang Bogor, Cilacap, Jakarta, Jepara, Sibolga, Medan, Kupang City	1.700.000.000	2.403.830.877
9	Program Pelindo Mengajar Pelindo Mengajar Program	4	1	Terlaksananya program bantuan sarana Pendidikan. Implementation of educational facility assistance programs.	Bintan, Tangerang Bintan, Tangerang	3.967.000.000	2.535.813.260

Tabel Realisasi Program TJSL
Realization of CSR Program

(dalam Rupiah)
(in Rupiah)

No	Nama Program Program Name	TPB SDG	Pilar Pillar	Target Capaian Achievement Target	Lokasi Location	Anggaran Budget	Realisasi Realization
10	Program Beasiswa dan Riset Pelindo Juara Pelindo Juara Scholarship and Research Program	4	1	Terlaksananya program pemberian bantuan pendidikan dan beasiswa kepada anak-anak berprestasi di tingkat SD, SMP, SMA dan Universitas serta bantuan riset kepelabuhanan. Implementation of programs providing educational assistance and scholarships to high-achieving students at elementary, junior high, senior high school, and university levels, as well as support for port-related research.	Jakarta, Kota Makassar, Medan, Kota Surabaya Jakarta, Makassar City, Medan, Surabaya City	4.900.000.000	2.749.488.000
11	Program SIP (Sahabat Inspiratif Pelindo) SIP (Sahabat Inspiratif Pelindo) Program	10	2	Terlaksananya Program untuk menciptakan inklusi bagi penyandang disabilitas melalui peningkatan kompetensi dan bantuan alat bantu penyandang disabilitas. Implementation of programs to promote inclusion for persons with disabilities through competency development and provision of assistive devices.	Jakarta, Medan, Makassar Sleman, Jakarta, Medan, Makassar, Sleman,	1.650.000.000	1.351.099.870
12	Penyelenggaraan Seminar dan Workshop Seminars and Workshops	16	4	Pogram peningkatan kapasitas pengelola TJSL melalui pelatihan, dan sertifikasi. Programs to enhance the capacity of CSR managers through training and certification.	Jakarta, Bogor Jakarta, Bogor	557.500.000	981.082.695
13	Pelatihan dan Sertifikasi TJSL CSR Training and Certification	16	4	Terlaksananya Peningkatan kapasitas pengelola TJSL. Implementation of capacity building for CSR managers.	Jakarta Jakarta	600.000.000	688.723.464
14	Perhitungan Dampak dan Publikasi TJSL CSR Impact Assessment and Publication	16	4	Terlaksananya perhitungana dampak atas pelaksanaan Program TJSL. Implementation of impact measurement for CSR program execution.	Jakarta, Gunung Sitoli Jakarta, Gunung Sitoli	1.400.000.000	1.545.522.536
	BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN UMK ECONOMIC AND MSE DEVELOPMENT SECTOR						
15	Program Maritimepreneur Maritimepreneur Program	8	2	Terlaksananya program menseleksi, mengkurasi calon UMK baru perusahaan, menyediakan lokasi pemasaran melalui *Local Pride Spot* dan bantuan kewirausahaan. Implementation of programs to select and curate prospective new MSMEs, provide marketing locations through Local Pride Spots, and deliver entrepreneurship support.	Jakarta, Bandung, Batam, Depok, Surabaya, Deli Serdang Jakarta, Bandung, Batam, Depok, Surabaya, Deli Serdang	3.505.000.000	3.399.502.082

Tabel Realisasi Program TJSL
Realization of CSR Program

(dalam Rupiah)
(in Rupiah)

No	Nama Program Program Name	TPB SDG	Pilar Pillar	Target Capaian Achievement Target	Lokasi Location	Anggaran Budget	Realisasi Realization
16	Program Akselerator UMK UMK Accelerator Program	8	2	Terlaksananya program lanjutan Maritimeprenuer melalaui inkubasi dan akselerasi kualitas produk dan keikutsertaan Pameran UMK. Implementation of the continuation of Maritimepreneur program through incubation and product quality acceleration, as well as participation in MSME exhibitions.	Jakarta, Bandung, Batam, Depok, Surabaya, Deli Serdang Jakarta, Bandung, Batam, Depok, Surabaya, Deli Serdang	6.550.000.000	6.246.165.052
17	Program Gedor Ekspor Gredor Ekspor Program	8	2	Terlaksananya program lanjutan Akselerasi melalui inkubasi khusus dan bantuan prasyarat ekspor untuk mendorong UMK *Champion* perusahaan menembus pasar global. Implementation of the continuation of acceleration programs through specialized incubation and export requirement support to enable the Company's MSME champions to enter global markets.	Kota Bandung, Kota Depok, Kanada, Tokyo, Sleman Bandung City, Depok City, Canada, Tokyo, Sleman	4.300.000.000	2.009.600.280
18	Program Teman Nelayan Teman Nelayan Program	9	2	Terlaksananya program pengembangan infrastruktur dan masyarakat desa agar menjadi kawasan mandiri dan sejahtera. Implementation of infrastructure and community development programs in villages to create self-sufficient and prosperous areas.	Bandar Lampung, Medan Bandar Lampung, Medan	3.100.000.000	1.347.043.882
19	Dukungan Pembangunan Nasional Ekonomi Support for National Economic Development	9	2	Program untuk mendukung pembangunan di daerah dalam bentuk bantuan infrastruktur yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi masyarakat. Programs to support regional development through infrastructure assistance aimed at improving community economic conditions.	Jakarta, Bekasi Jakarta, Bekasi	5.000.000.000	3.228.416.000
20	Program PUMK PUMK Program	8	2	Program pendanaan bagi Usaha Mikro dan Kecil sebagai wujud kontribusi perusahaan bagi peningkatan perekonomian nasional menggunakan anggaran dana bergulir Program Kemitraan. Funding programs for Micro and Small Enterprises as part of the Company's contribution to national economic growth, utilizing revolving fund budgets under the Partnership Program.	Kolaborasi BRI BRI Collaboration	13.442.603.041	13.442.603.041

Tabel Realisasi Program TJSL
Realization of CSR Program

(dalam Rupiah)
(in Rupiah)

No	Nama Program Program Name	TPB SDG	Pilar Pillar	Target Capaian Achievement Target	Lokasi Location	Anggaran Budget	Realisasi Realization
				PROGRAM NON PRIORITAS NON PRIORITY PROGRAM			
21	Program Pelindo Berbagi dan Peduli Pelindo Berbagi dan Peduli Program	1	1	Terlaksananya program penyaluran bantuan bagi masyarakat kurang mampu di sekitar area pelabuhan serta dukungan Mudik sebanyak 21 lokasi. Implementation of assistance programs for underprivileged communities in areas surrounding the port, as well as support for the Mudik program across 21 locations.	Banyuwangi, Biak, Lampung, Jakarta, Medan, Makassar, Manokwari, Surabaya, Gorontalo Karimun, Palembang, Boyolali Banyuwangi, Biak, Lampung, Jakarta, Medan, Makassar, Manokwari, Surabaya, Gorontalo, Karimun, Palembang, Boyolali	20.275.000.000	26.071.407.504
22	Program Pelindo Sehat Pelindo Sehat Program	3	1	Telaksananya program kesehatan penanggulangan stunting bagi ibu dan bayi di kawasan perusahaan. Implementation of health programs for stunting prevention targeting mothers and infants within the Company's operational areas.	Lampung, Gresik, Medan, Samarinda, Semarang, Jakarta Lampung, Gresik, Medan, Samarinda, Semarang, Jakarta	6.972.000.000	6.470.151.537
23	Program TJSL Pada Proyek Strategis (CSV) CSR Program for Strategic Projects (CSV)	13	3	Program bantuan dan dukungan terhadap reaksi cepat tanggap bencana dan musibah. Provision of assistance and support for rapid emergency response to disasters and incidents.	Jakarta, Medan Jakarta, Medan	1.100.000.000	1.507.761.126
24	Bantuan Sarana Ibadah Assistance for Places of Worship	2	1	Terlaksananya program pembangunan dan/ atau renovasi sarana dan prasarana ibadah. Implementation of programs for the construction and/or renovation of worship facilities and infrastructure.	Lampung, Bengkulu, Manado, Medan, Jakarta, Cirebon, Lampung, Bengkulu, Manado, Medan, Jakarta, Cirebon,	2.040.000.000	2.511.013.659
25	Bantuan Fasilitas Umum Assistance for Public Facilities	11	3	Terlaksananya program pembangunan dan/atau renovasi sarana dan prasarana umum, renovasi rumah. Implementation of programs for the construction and/or renovation of public facilities and infrastructure, including housing renovations.	Bogor Bogor	8.115.000.000	12.548.071.735

Tabel Realisasi Program TJSL
Realization of CSR Program

(dalam Rupiah)
(in Rupiah)

No	Nama Program Program Name	TPB SDG	Pilar Pillar	Target Capaian Achievement Target	Lokasi Location	Anggaran Budget	Realisasi Realization
26	Program Tanggap Bencana dan Musibah Disaster and Calamity Response Program	11	3	Terlaksananya program tanggap bencana dan musibah. Implementation of disaster and emergency response programs.	Bandar Lampung, Sukabumi Bandar Lampung, Sukabumi	900.000.000	829.287.874
TOTAL REALISASI PENYALURAN DISTRIBUTION REALIZATION							**139.617.848.151**

Tabel TPB Keseluruhan yang dilaksanakan Perusahaan
Overall TPB carried out by the Company

(dalam Rupiah)
(in Rupiah)

No	TPB SDG	Realisasi Tahun 2024 2024 Realization	RKA 2025	Realisasi Tahun 2025 2025 Realization	Presentase Capaian Percentage of Achievement	
					Realisasi Tahun 2024/2023 2024/2023 Realization (%)	Realisasi/RKA Realization/RKA (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(3)	(7)=(5)/(4)
A	**PILAR SOSIAL** SOCIAL PILLAR	**52.872.457.633**	**45.714.000.000**	**58.363.998.879**	**110,39**	**127,67**
1	TPB 1 SDG 1	-	**20.275.000.000**	**26.071.407.504**	0,00	128,59
2	TPB 2 SDG 2	25.523.565.756	**6.972.000.000**	**6.470.151.537**	25,35	92,80
3	TPB 3 SDG 3	10.435.569.016	-	-	0,00	0,00
4	TPB 4 SDG 4	16.913.322.861	**18.467.000.000**	**25.822.439.838**	152,68	139,83
5	TPB 5 SDG 5	-	-	-	0,00	0,00
B	**PILAR EKONOMI** ECONOMIC PILLAR	**25.952.115.803**	**25.205.000.000**	**19.089.588.295**	**73,56**	**75,74**
1	TPB 7 SDG 7	-	-	-	-	-
2	TPB 8 SDG 8	14.043.323.866	**14.355.000.000**	**11.655.267.417**	83,00	81,19
3	TPB 9 SDG 9	10.749.492.437	**8.100.000.000**	**4.575.459.882**	42,56	56,49
4	TPB 10 SDG 10	1.159.299.500	**1.650.000.000**	**1.351.099.870**	116,54	81,88
5	TPB 17 SDG 17	-	**1.100.000.000**	**1.507.761.126**	-	137,07

Tabel TPB Keseluruhan yang dilaksanakan Perusahaan
Overall TPB carried out by the Company

(dalam Rupiah)
(in Rupiah)

No	TPB SDG	Realisasi Tahun 2024 2024 Realization	RKA 2025	Realisasi Tahun 2025 2025 Realization	Presentase Capaian Percentage of Achievement	
					Realisasi Tahun 2024/2023 2024/2023 Realization (%)	Realisasi/RKA Realization/RKA (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(3)	(7)=(5)/(4)
C	PILAR LINGKUNGAN ENVIRONMENTAL PILLAR	40.208.725.678	48.560.500.000	40.208.725.678	113,18	93,71
1	TPB 6 SDG 6	1.969.248.726	-	-	0,00	0,00
2	TPB 11 SDG 11	23.387.344.627	27.855.000.000	26.242.982.018	112,21	94,21
3	TPB 12 SDG 12	2.874.297.715	2.850.000.000	3.502.267.987	121,85	122,89
4	TPB 13 SDG 13	769.080.991	4.100.000.000	2.270.989.587	295,29	55,39
5	TPB 14 SDG 14	2.250.586.016	7.450.000.000	8.242.591.635	366,24	110,64
6	TPB 15 SDG 15	8.958.167.603	6.305.500.000	5.247.498.014	58,58	83,22
D	PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA LAW AND GOVERNANCE PILLAR	3.208.885.721	2.557.500.000	3.215.328.695	100,20	125,72
1	TPB 16 SDG 15	3.208.885.721	2.557.500.000	3.215.328.695	100,20	125,72
TOTAL TOTAL		122.242.184.835	122.037.000.000	126.175.245.110	103,39	103,22

Berikut adalah rincian pelaksanaan Program TJSL Tahun 2025 CID yang dikelompokkan ke dalam 4 Pilar yang bersumber dari biaya Perusahaan:

1. Pilar Sosial
   Pilar Sosial bertujuan untuk tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Program TJSL perusahaan yang telah dilaksanakan meliputi:
   a. TPB 1 (Tanpa Kemiskinan)
      Sampai dengan tahun 2025 telah terlaksana penyaluran dana TJSL Bantuan dan/atau Kegiatan Lainnya pada TPB 1 sebesar Rp26.071.407.504. atau tercapai 128,59% dari anggaran tahun 2025 sebesar Rp20.275.000.000.

The following details the implementation of 2025 CID Corporate Social Responsibility (CSR) Program, grouped into four pillars funded by the Company:

1. Social Pillar
   The Social Pillar aims to achieve the fulfillment of basic human rights in a fair and equal manner to improve the welfare of all members of society. The Company's CSR programs that have been implemented include:

   a. SDG 1 (No Poverty)
      By 2025, Rp26,071,407,504 in CSR funds for Assistance and/or Other Activities for SDG 1 have been disbursed, representing 128.59% of the 2025 budget of Rp20,275,000,000.

b. TPB 2 (Tanpa Kelaparan)
Sampai dengan tahun 2025 telah terlaksana penyaluran dana TJSL Bantuan dan/atau Kegiatan Lainnya pada TPB 2 sebesar Rp6.470.151.537. atau tercapai 92,80% dari anggaran tahun 2025 sebesar Rp6.972.000.000.

c. TPB 4 (Pendidikan Berkualitas)
Sampai dengan tahun 2025 telah terlaksana penyaluran dana TJSL Bantuan dan/atau Kegiatan Lainnya pada TPB 4 sebesar Rp25.822.439.838 atau 139,83% dari anggaran tahun 2025 sebesar Rp18.467.000.000.

2. Pilar Ekonomi
Pilar Ekonomi bertujuan untuk tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau serta didukung kemitraan. Program TJSL perusahaan yang telah dilaksanakan meliputi:

a. TPB 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi)
Sampai dengan tahun 2025 telah terlaksana penyaluran dana TJSL Bantuan dan/atau Kegiatan Lainnya pada TPB 8 sebesar Rp11.655,267.417 atau 81,19% dari anggaran tahun 2025 sebesar Rp14.355.000.000.

b. TPB 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur)
Sampai dengan tahun 2025 telah terlaksana penyaluran dana TJSL Bantuan dan/atau Kegiatan Lainnya pada TPB 9 sebesar Rp4.575.459.882 atau 56,49% dari anggaran tahun 2025 sebesar Rp8.100.000.000.

c. TPB 10 (Berkurangnya Kesenjangan)
Sampai dengan tahun 2025 telah terlaksana penyaluran dana TJSL Bantuan dan/atau Kegiatan Lainnya pada TPB 10 sebesar Rp1.351.099.870 atau 81,88% dari anggaran tahun 2025 sebesar Rp1.650.000.000.

d. TPB 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan)
Sampai dengan tahun 2025 telah terlaksana penyaluran dana TJSL Bantuan dan/atau Kegiatan Lainnya pada TPB 17 sebesar Rp1.507.761.126 atau 71,40% dari anggaran tahun 2025 sebesar Rp2.100.000.000.

3. Pilar Lingkungan
Pilar Lingkungan bertujuan untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan. Program TJSL perusahaan yang dilaksanakan meliputi:

a. TPB 11 (Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan)
Sampai dengan tahun 2025 telah terlaksana penyaluran dana TJSL Bantuan dan/atau Kegiatan Lainnya pada TPB 11 sebesar Rp26.242.982.018 atau 112,21% dari anggaran tahun 2025 sebesar Rp27.855.000.000.

b. SDG 2 (No Hunger)
By 2025, Rp6,470,151,537 in CSR funds for Assistance and/or Other Activities for SDG 2 have been disbursed. or 92.80% of the 2025 budget of Rp6,972,000,000.

c. SDG 4 (Quality Education)
As of 2025, Rp25,822,439,838 in CSR funds for Assistance and/or Other Activities under SDG 4 have been disbursed, representing 139.83% of the 2025 budget of Rp18,467,000,000.

2. Economic Pillar
The Economic Pillar aims to achieve quality economic growth through sustainable employment and business opportunities, innovation, inclusive industry, adequate infrastructure, affordable clean energy, and supported partnerships. The company's CSR programs that have been implemented include:

a. SDG 8 (Decent Work and Economic Growth)
By 2025, CSR funds for Assistance and/or Other Activities under SDG 8 have been disbursed amounting to Rp11,655,267,417, or 81.19% of the 2025 budget of Rp14,355,000,000.

b. SDG 9 (Industry, Innovation, and Infrastructure)
By 2025, CSR funds for Assistance and/or Other Activities under SDG 9 have been disbursed amounting to Rp4,575,459,882, or 56.49% of the 2025 budget of Rp8,100,000,000.

c. SDG 10 (Reduced Inequality)
By 2025, the disbursement of CSR funds for Assistance and/or Other Activities under SDG 10 has reached Rp1,351,099,870, or 81.88% of the 2025 budget of Rp1,650,000,000.

d. SDG 17 (Partnerships to Achieve Goals)
By 2025, the disbursement of CSR funds for Assistance and/or Other Activities under SDG 17 has reached Rp1,507,761,126, or 71.40% of the 2025 budget of Rp2,100,000,000.

3. Environmental Pillar
The Environmental Pillar aims to manage natural resources and the environment sustainably as a support for all life. The company's CSR programs include:

a. SDG 11 (Sustainable Cities and Settlements)
By 2025, CSR funds for Assistance and/or Other Activities for SDG 11 have been disbursed amounting to Rp26,242,982,018, or 112.21% of the 2025 budget of Rp27,855,000,000.

b. TPB 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab)
Sampai dengan tahun 2025 telah terlaksana penyaluran dana TJSL Bantuan dan/atau Kegiatan Lainnya pada TPB 12 sebesar Rp3.502.267.987 atau 122,89% dari anggaran tahun 2025 sebesar Rp2.850.000.000.

c. TPB 13 (Penanganan Perubahan Iklim)
Sampai dengan tahun 2025 telah terlaksana penyaluran dana TJSL Bantuan dan/atau Kegiatan Lainnya pada TPB 13 sebesar Rp2.270.989.587 atau 55,39% dari anggaran tahun 2025 sebesar Rp4.100.000.000.

d. TPB 14 (Ekosistem Laut)
Sampai dengan tahun 2025 telah terlaksana penyaluran dana TJSL Bantuan dan/atau Kegiatan Lainnya pada TPB 14 sebesar Rp8.242.591.635 atau 110,64% dari anggaran tahun 2025 sebesar Rp7.450.000.000.

e. TPB 15 (Ekosistem Darat)
Sampai dengan tahun 2025 telah terlaksana penyaluran dana TJSL Bantuan dan/atau Kegiatan Lainnya pada TPB 15 sebesar Rp5.247.498.014 atau 83,22% dari anggaran tahun 2025 sebesar Rp6.305.500.000.

4. Pilar Hukum dan Tata Kelola
Pilar Hukum dan Tata Kelola bertujuan untuk terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan negara berdasarkan hukum. Program TJSL perusahaan yang dilaksanakan meliputi:

a. TPB 16 (Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh)
Sampai dengan tahun 2025 telah terlaksana penyaluran dana TJSL Bantuan dan/atau Kegiatan Lainnya pada TPB 16 sebesar Rp3.215.328.695 atau 125,72% dari anggaran tahun 2025 sebesar Rp2.557.500.000.

b. SDG 12 (Responsible Consumption and Production)

By 2025, CSR funds for Assistance and/or Other Activities for SDG 12 have been disbursed amounting to Rp3,502,267,987, or 122.89% of the 2025 budget of Rp2,850,000,000.

c. SDG 13 (Climate Action)
By 2025, the disbursement of CSR funds for Assistance and/or Other Activities under SDG 13 totaled Rp2,270,989,587, or 55.39% of the 2025 budget of Rp4,100,000,000.

d. SDG 14 (Life Below Water)
By 2025, the disbursement of CSR funds for Assistance and/or Other Activities under SDG 14 totaled Rp8,242,591,635, or 110.64% of the 2025 budget of Rp7,450,000,000.

e. SDG 15 (Life on Land)
As of 2025, the disbursement of CSR funds for Assistance and/or Other Activities under TPB 15 totaled Rp5,247,498,014, or 83.22% of the 2025 budget of Rp6,305,500,000.

4. Law and Governance Pillar
The Law and Governance Pillar aims to achieve legal certainty and effective, transparent, accountable, and participatory governance to create national security stability based on the rule of law. The company's CSR programs implemented include:

a. SDG 16 (Peace, Justice, and Resilient Institutions)

By 2025, CSR funds for Assistance and/or Other Activities under SDG 16 totaled Rp3,215,328,695, or 125.72% of the 2025 budget of Rp2,557,500,000.

Dokumentasi Pelaksanaan Program
Program Documentation

Program Dukungan Pembangunan Sosial
Social Development Support Program

Program Pengelolaan Sampah Terpadu
Integrated Waste Management Program

Program *Carbon Village* Pelindo (CSV) Social Development Support Program

Program Pelindo Lestari (CSV)

Program Pelindo *Communitree*
Pelindo Communitree Program

Program Dukungan Nasional Pendidikan
National Education Support Program

Dokumentasi Pelaksanaan Program
Program Documentation

Program Beasiswa dan Riset Pelindo Juara
Pelindo Juara Scholarship and Research Program

Program Penunjang Pendidikan
Educational Support Program

Program Bantuan Sarana Pendidikan
Educational Facilities Assistance Program

Program Pelindo Mengajar
Pelindo Mengajar Program

Program Sahabat Inspiratif Pelindo
Sahabat Inspiratif Pelindo Program

Pelatihan dan Sertifikasi TJSL
CSR Training and Certification

Dokumentasi Pelaksanaan Program
Program Documentation

Perhitungan Dampak dan Publikasi TJSL
CSR Impact Assessment and Publication

Program Mahasiswa Magang
Student Internship Program

Program Pelatihan Purnabakti
Retirement Training Program

Program *Maritimepreneur*
Maritimepreneur Program

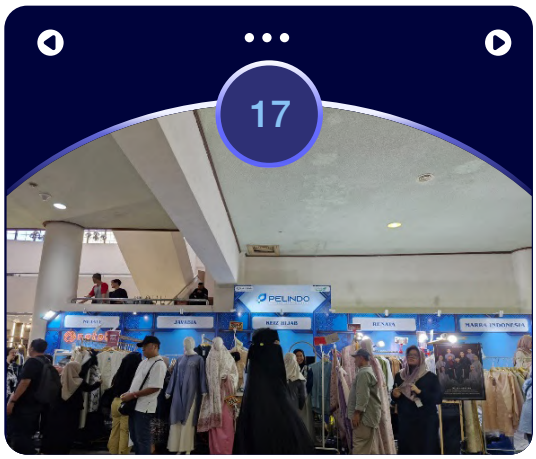

Program Akselerator UMK
MSME Accelerator Program

Program Gedor Ekspor
Gedor Ekspor Program

Dokumentasi Pelaksanaan Program
Program Documentation

Program Teman Nelayan
Teman Nelayan Program

PProgram Dukungan Nasional Ekonomi
National Economic Support Program

Program Pelindo Berbagi dan Peduli
Pelindo Berbagi dan Peduli Program

Program Pelindo Sehat
Pelindo Sehat Program

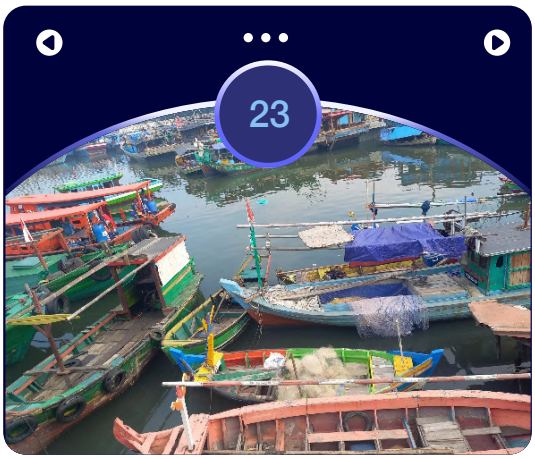

Program TJSL pada Proyek Strategis (CSV)
CSR Program for Strategic Projects (CSV)

Program Bantuan Sarana Ibadah
House of Worship Assistance Program

Dokumentasi Pelaksanaan Program
Program Documentation

Bantuan Fasilitas Umum
Public Facility Assistance

Program Tanggap Bencana dan Musibah
Disaster and Calamity Response Program

Program Kolaborasi BUMN
State-Owned Enterprise Collaboration Program

Program Kolaborasi dengan BUMN yang dilaksanakan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

The collaboration program with state-owned enterprises (SOEs) implemented in 2025 is as follows:

No.	Nama Program Program Name	TPB SDG	Realisasi (Rp) Realization (Rp)	Lokasi Location
1	Program Pelatihan dan Pengembangan UMK Kolaborasi BRI di Surabaya BRI Collaborative MSE Training and Development Program in Surabay	8	Rp17.530.000	Palm Park Hotel & Convention, Surabaya
2	Program Pelatihan dan Pengembangan UMK Kolaborasi BRI di Lombok BRI Collaborative MSE Training and Development Program in Lombok	8	Rp4.440.000	Hotel Santika Mataram Santika Hotel, Mataram
3	Program Pelatihan dan Pengembangan UMK Kolaborasi BRI di Makassar BRI Collaborative MSE Training and Development Program in Makassar	8	Rp30.000.000	Hotel Four Point By Sheraton Makassar Four Point by Sheraton Hotel, Makassar
4	Program Pelatihan dan Pengembangan UMK Kolaborasi BRI di Tapanuli Tengah BRI Collaborative MSE Training and Development Program in Central Tapanuli	8	Rp75.000.000	Hotel PIA Pandan, Kab. Tapanuli Tengah PIA Pandan Hotel, Central Tapanuli Regency

Jenis Bantuan Assistance Type	Jumlah Penerima Manfaat Number of Beneficiaries	Keterangan Dampak yang diberikan bagi penerima manfaat Description of the impact provided to beneficiaries
Pelatihan Dasar Keuangan dan Legalitas bagi UMK BUMN Kolaborasi BRI Basic Finance and Legality Training for SOE MSMEs in Collaboration with BRI	12 Mitra Binaan 12 Fostered Partners	Mendapatkan sosialisasi, pelatihan dan keterampilan terkait dasar – dasar keuangan dan legalitas bagi UMK kolaborasi BRI. Receive outreach, training, and skills related to financial and legal fundamentals for BRI-collaborating MSMEs.
Pelatihan Dasar Keuangan dan Legalitas bagi UMK BUMN Kolaborasi BRI Basic Finance and Legality Training for SOE MSMEs in Collaboration with BRI	2 Mitra Binaan 2 Fostered Partners	1. Pengurusan legalitas UMKM 2. Digitalisasi 3. Pengantar produk dan inovasi 4. teknik pemasaran dan branding 1. MSME legality management 2. Digitalization 3. Product and innovation introduction 4. Marketing and branding techniques
Pelatihan Dasar Keuangan dan Legalitas bagi UMK BUMN Kolaborasi BRI Basic Finance and Legality Training for SOE MSMEs in Collaboration with BRI	20 Mitra Binaan 20 Fostered Partners	1. Pengurusan legalitas UMKM 2. Literasi keuangan 3. Teknis pemasaran dan *branding* 1. MSME legality management 2. Financial literacy 3. Marketing and branding techniques
Pelatihan Manajemen keuangan dan Menyusun Laporan Keuangan (manual dan aplikasi Si Apik) Financial Management and Financial Report Preparation Training (manual and Si Apik application)	50 Mitra Binaan 50 Fostered Partners	1. Membantu pelaku UMKM memahami konsep dasar akuntansi 2. Memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam menyusun laporan keuangan 3. Memperkenalkan dan memberikan pemahaman tentang fungsi, fitur dan penggunaan aplikasi Si Apik 4. Meningkatkan efisiensi dalam pencatatan transaksi 5. Mendukung pelaku umkm untuk mengambil keputusan bisnis yang tepat 1. Helping MSMEs understand basic accounting concepts 2. Providing knowledge and skills in preparing financial reports 3. Introducing and providing an understanding of the functions, features, and use of Si Apik application 4. Increasing efficiency in recording transactions 5. Supporting MSMEs in making informed business decisions

No.	Nama Program Program Name	TPB SDG	Realisasi (Rp) Realization (Rp)	Lokasi Location
5	Program Pelatihan dan Pengembangan UMK Kolaborasi BRI di Toli – toli dan Boul, Sulawesi Tangah BRI Collaborative MSE Training and Development Program in Toli-Toli and Boul, Central Sulawesi	8	Rp201.465.000	Hotel Mitra Utama, Toli – toli dan Hotel Surya Wisata, Boul Mitra Utama Hotel, Tolitoli and Surya Wisata Hotel, Buol
6	Join Program Rehabilitasi dan Pemberdayaan Mangrove bersama dengan Kementerian Kehutanan, Kemenko Pangan dan KKP Joint Mangrove Rehabilitation and Empowerment Program with the Ministry of Forestry, the Coordinating Ministry for Food and Fisheries, and the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries	13	Rp1.695.985.870	1. Indramayu, Jawa Barat 2. Kuala Tanjung, Sumatera Utara 3. Serang, Banten 4. Tanjung Rusa, Belitung 5. Kosambi, Tangerang 6. Bangkalan, Madura 7. Tonra, Sulawesi Selatan 8. Mare, Sulawesi Selatan 9. Sibulue, Sulawesi Selatan 10. Sajoanging, Sulawesi Selatan 1. Indramayu, West Java 2. Kuala Tanjung, North Sumatra 3. Serang, Banten 4. Tanjung Rusa, Belitung 5. Kosambi, Tangerang 6. Bangkalan, Madura 7. Tonra, South Sulawesi 8. Mare, South Sulawesi 9. Sibulue, South Sulawesi 10. Sajoanging, South Sulawesi
7	Program Kolaborasi TJSL Bantuan Penunjang Pendidikan untuk Tenaga Pendidik Yayasan Barunawati Nusantara CSR Collaborative Program: Educational Support Assistance for Educators at Barunawati Nusantara Foundation		Rp864.000.000	Barunawati Nusantara Tanjung Priok.

Jenis Bantuan Assistance Type	Jumlah Penerima Manfaat Number of Beneficiaries	Keterangan Dampak yang diberikan bagi penerima manfaat Description of the impact provided to beneficiaries
Pelatihan Manajemen keuangan dan Menyusun Laporan Keuangan (manual dan aplikasi Si Apik) Financial Management and Financial Report Preparation Training (manual and Si Apik application)	100 Mitra Binaan 100 Fostered Partners	1. Membantu pelaku UMKM memahami konsep dasar akuntansi 2. Memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam menyusun laporan keuangan 3. Memperkenalkan dan memberikan pemahaman tentang fungsi, fitur dan penggunaan aplikasi Si Apik 4. Meningkatkan efisiensi dalam pencatatan transaksi 5. Mendukung pelaku umkm untuk mengambil keputusan bisnis yang tepat 1. Helping MSMEs understand basic accounting concepts 2. Providing knowledge and skills in preparing financial reports 3. Introducing and providing an understanding of the functions, features, and use of Si Apik application 4. Increasing efficiency in recording transactions 5. Supporting MSMEs in making informed business decisions
Bantuan Rehabilitasi Mangrove Mangrove Rehabilitation Assistance	10 Kelompok Tani 10 Farmer Groups	1. Melindungi lingkungan dari abrasi dan banjir ROB 2. Mangrove mampu menyerap karbon dengan baik sehingga kualitas lingkungan menjadi lebih sehat 3. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui peningkatan hasil budidaya ikan dan kepiting 1. Protecting the environment from abrasion and tidal flooding 2. Mangroves are able to absorb carbon effectively, thus improving environmental quality 3. Improving the community's economy by increasing fish and crab cultivation yield
Bantuan Penunjang Kesejahteraan Tenaga Pendidik. Assistance to Support the Welfare of Educators.	153 tenaga pendidik (guru dan tenaga kependidikan) 153 teaching staff (teachers and education staff)	1. Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Pendidik YBN yang Masih dibawah standar UMP 2. Meningkatkan motivasi dan semangat mengajar guru sehingga lebih fokus dan optimal 3. Mengurangi Potensi perpindahan tenaga pendidik ke satuan pendidikan lain akibat faktor kesejahteraan 4. Mendorong peningkatan kualitas proses belajar di sekolah-sekolah dibawah Yayasan Barunawati Nusantara 1. Improve the welfare of YBN educators whose wages are still below the minimum wage (UMP) standard. 2. Increase teacher motivation and enthusiasm for teaching, enabling them to be more focused and perform optimally. 3. Reduce the potential for teacher turnover to other educational institutions due to welfare factors. 4. Encourage improvements in the quality of the learning process in schools under Barunawati Nusantara Foundation.

No.	Nama Program Program Name	TPB SDG	Realisasi (Rp) Realization (Rp)	Lokasi Location
8	Program Kolaborasi Pelita Warna Lapas Anak bersama LPKA Kelas II Jakarta Pelita Warna Collaborative Program for Juvenile Prisons with Class II LPKA Jakarta	4	Rp545.545.000	Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Jakarta Jakarta Class II Special Child Development Institution (LPKA)
9	Program Kolaborasi TJSL BUMN Konservasi Lingkungan Raja Ampat Tahap II CSR Collaborative Program for Raja Ampat Environmental Conservation Phase II	14	Rp364.400.000	Kepulauan Raja Ampat Raja Ampat Islands

Jenis Bantuan Assistance Type	Jumlah Penerima Manfaat Number of Beneficiaries	Keterangan Dampak yang diberikan bagi penerima manfaat Description of the impact provided to beneficiaries
	135 Anak Binaan 135 Fostered Children	1. Meningkatkan rasa percaya diri Anak Binaan 2. Meningkatkan keterampilan sebagai bekal setelah menyelesaikan masa pembinaan 3. Melatih disiplin, tanggung jawab dan semangat kerja 4. Membuka peluang wirausaha 1. Increase the self-confidence of fostered children. 2. Improve skills to prepare them after completing the coaching period. 3. Cultivate discipline, responsibility, and work ethic. 4. Open up entrepreneurial opportunities.
Bantuan diKampung Mutus antara lain: 1. Pendampingan BUMDes, Pendampingan kelompok Konservasi, bantuan daya listrik,Renovasi Sekolah Dasar, Pelestarian terumbu karang serta penanaman mangrove 2. Bantuan diKampung Manyaifun antara lain: 3. Renovasi rumah ibadah (Gereja Kristen), Renovasi Sekolah Dasar, Pemberian genset Assistance in Mutus Village includes: 1. Village-Owned Enterprise (BUMDes) assistance, conservation group assistance, electricity assistance, elementary school renovation, coral reef preservation, and mangrove planting. 2. Assistance in Manyaifun Village includes: 3. Renovation of places of worship (Christian Church), elementary school renovation, and provision of generators.	Kampung Mutus: 119 KK 500 Jiwa Kampung Manyaifun 59 KK 115 Jiwa Mutus Village: 119 heads of family 500 persons Manyaifun Village 59 heads of family 115 persons	1. Terbentuknya dan pendampingan 1 unit usaha BUMDes berbasis konservasi melibatkan 7 pengurus 2. Lingkungan menjadi lebih bersih karena terdapat penanaman mangrove. 3. Tersedianya penambahan kapasitas daya listrik di mutus dan manyaifun 4. Peningkatan kualitas pembelajaran siswa karena perbaikan fasilitas/renovasi sekolah dan pemasangan jaringan internet 5. Memperkuat kapasitas kelompok lokal dalam menjaga ekosistem laut dan kawasan pesisir dengan memiliki legalitas dengan diberikannya sertifikasi 4 orang untuk tingkat open water dan 2 orang untuk tingkat *advance*. 6. Memberikan kenyamanan bagi Masyarakat dalam beribadah karena rumah ibadah yang ada sudah di perbaiki. 1. Establish and mentor a conservation-based village-owned enterprise (BUMDes) involving seven administrators. 2. Cleaner environment due to mangrove planting. 3. Availability of additional electricity capacity in Mutus and Manyaifun. 4. Improved quality of student learning due to improved school facilities/renovations and internet network installation. 5. Strengthening the capacity of local groups in preserving marine ecosystems and coastal areas by obtaining legal certification for four people at the open water level and two at the advanced level. 6. Providing comfort for the community in worship because the existing place of worship has been repaired.

TJSL Pemenuhan Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/Mbu/04/2021

CSR Compliance with Minister of SOEs Regulation Number PER-05/MBU/04/2021

Perseroan telah merancang strategi keberlanjutan yang komprehensif untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, melalui penerapan program TJSL yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya serta dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pendekatan bisnis Perseroan. Perseroan senantiasa menyusun dan mengimplementasikan program-program TJSL yang mampu membawa manfaat optimal bagi seluruh pemangku kepentingan. Penyusunan rencana kerja dan anggaran program TJSL Perseroan berpedoman pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2022 tentang Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara serta Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Nomor PER-6/MBU/09/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2022 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Perseroan telah merancang strategi keberlanjutan yang komprehensif untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, melalui penerapan program TJSL yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya serta dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pendekatan bisnis Perseroan. Perseroan senantiasa menyusun dan mengimplementasikan program-program TJSL yang mampu membawa manfaat optimal bagi seluruh pemangku kepentingan. Penyusunan rencana kerja dan anggaran program TJSL Perseroan berpedoman pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2022 tentang Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara serta Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Nomor PER-6/MBU/09/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2022 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Informasi TJSL Sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/ Seojk.04/2021

Information on CSR in Accordance with OJK Circular Letter Number 16/SEOJK.04/2021

Selain menyusun Laporan TJSL sesuai dengan Standar Kementerian BUMN dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/04/2021, sebagai bentuk pemenuhan kepatuhan Perseroan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, Perseroan juga telah menyusun Laporan Keberlanjutan Perseroan Tahun 2022 yang disajikan secara terpisah dari Laporan Tahunan ini. Laporan Keberlanjutan ini merupakan laporan berkala yang mengungkapkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan yang disusun dengan mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/ SEOJK.04/2021 Tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik serta Pedoman Pelaporan Keberlanjutan (Standar GRI).

Apart from preparing the CSR Report in accordance with the Ministry of SOEs standards under Regulation Number PER-05/MBU/04/2021, as part of the Company's compliance with Financial Services Authority Regulation Number 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Institutions, Issuers, and Public Companies, the Company has also prepared a 2022 Sustainability Report, which is presented separately from this Annual Report. This Sustainability Report is a periodic report that discloses the Company's Social and Environmental Responsibility and is prepared in accordance with the Financial Services Authority Circular Letter Number 16/SEOJK.04/2021 regarding the Form and Content of Annual Reports of Issuers or Public Companies, as well as Sustainability Reporting Guidelines (GRI Standards).

PELINDO
INDONESIA MARITIME GATEWAY

Laporan Keuangan
Financial Statements

www.pelindo.co.id

Referensi Silang SEOJK No. 16 / SEOJK.04/2021: Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik

Cross-Reference No. 16/SEOJK.04/2021: Format and Completing the Annual Report of Issuers or Public Companies

Keterangan Description	**Halaman** Page
Ketentuan Umum General Terms	
Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: In this Financial Services Authority Circular Letter what is meant by:	
a. Laporan Tahunan adalah laporan pertanggungjawaban direksi dan dewan komisaris dalam melakukan pengurusan dan pengawasan terhadap emiten atau perusahaan publik dalam kurun waktu 1 (satu) tahun buku kepada rapat umum pemegang saham yang disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Laporan Tahunan emiten atau perusahaan publik. The Annual Report is a report on the board of directors and board of commissioners accountability in managing and supervising issuers or public companies within a period of 1 (one) fiscal year to the general meeting of shareholders prepared based on the provisions of the Financial Services Authority Regulation concerning the Annual Report of issuers or public companies.	
b. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum. Issuers are parties who make public offerings.	
c. Perusahaan Publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Public Company is a company whose shares are owned by at least 300 (three hundred) shareholders and has a paid-up capital of at least Rp3,000,000,000.00 (three billion rupiah) or a number of shareholders and paid-up capital as determined by the Financial Services Authority.	
d. Perusahaan Terbuka adalah Emiten yang telah melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik A Public Company is an Issuer that has made a public offering of equity securities or a Publically-listed Company	
e. Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup suatu lembaga jasa keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan. A Sustainability Report is a report published to the public that contains the economic, financial, social, and environmental performance of a financial service institution, Issuer, and Public Company in running a sustainable business.	
f. Direksi: Board of Directors:	
» bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan for an Issuer or a Public Company in the form of a limited liability company, it is the Board of Directors as referred to in the Financial Services Authority Regulation concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of an Issuer or Public Company; and	
» bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang melaksanakan pengurusan badan hukum tersebut sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai badan hukum tersebut. for an Issuer or a Public Company in the form of a legal entity other than a limited liability company, it is the body that carries out the management of the legal entity as referred to in the laws and regulations concerning the legal entity.	
g. Dewan Komisaris: Board of Commissioners:	

Keterangan Description	Halaman Page
» bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan for an Issuer or a Public Company in the form of a limited liability company, the Board of Commissioners as referred to in the Financial Services Authority Regulation concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of an Issuer or Public Company; and	
» bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang melakukan pengawasan badan hukum tersebut sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai badan hukum tersebut. for the Issuer or Public Company in the form of a legal entity other than a limited liability company, it is the body that supervises the legal entity as referred to in the laws and regulations concerning the legal entity.	
h. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS: General Meeting of Shareholders hereinafter abbreviated as GMS:	
» bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan for an Issuer or a Public Company in the form of a limited liability company, it is the GMS as referred to in the Financial Services Authority Regulation concerning the Planning and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public Company; and	
» bagi Emiten atau Perusahaan Publik berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada organ yang melaksanakan fungsi pengurusan dan fungsi pengawasan, dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar yang mengatur badan hukum tersebut. for an Issuer or Public Company in the form of a legal entity other than a limited liability company, it is the body that has authority that is not given to any other body that carries out management and supervisory functions, within the limits specified in the legislation and/or articles of association governing the legal entity. .	
Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik merupakan sumber informasi penting bagi investor atau pemegang saham sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi dan sarana pengawasan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik. The Annual Report of Issuers or Public Companies is an important source of information for investors or shareholders as one of the basic considerations in making investment decisions and a means of supervision of Issuers or Public Companies.	
Seiring dengan perkembangan pasar modal dan meningkatnya kebutuhan investor atau pemegang saham atas keterbukaan informasi, Direksi dan Dewan Komisaris dituntut untuk menyajikan informasi yang berkualitas, akurat, dan akuntabel melalui Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Along with the development of the capital market and the increasing need for information disclosure by investors or shareholders, the Board of Directors and the Board of Commissioners are required to present quality, accurate, and accountable information through the Annual Reports of Issuers or Public Companies.	
Laporan Tahunan yang disusun secara teratur dan informatif dapat memberikan kemudahan bagi investor atau pemegang saham dan pemangku kepentingan dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan. Annual Reports that are prepared regularly and informatively can provide convenience for investors or shareholders and stakeholders in obtaining the required information.	
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan pedoman bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang wajib diterapkan dalam menyusun Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan. This Financial Services Authority Circular is a guideline for Issuers or Public Companies that must be applied in preparing Annual Reports and Sustainability Reports.	
Bentuk Laporan Report Format	
Laporan Tahunan disajikan dalam bentuk dokumen cetak dan dokumen elektronik. The Annual Report is presented in the form of printed and electronic documents.	
Laporan Tahunan yang disajikan dalam bentuk dokumen cetak, dicetak pada kertas yang berwarna terang, berkualitas baik, berukuran A4, dijilid, dan dapat diperbanyak dengan kualitas yang baik. The Annual Report is presented in the form of a printed document, printed on light colored paper, of good quality, A4 size, bound, and can be reproduced with good quality.	
Laporan Tahunan dapat menyajikan informasi berupa gambar, grafik, tabel, dan/atau diagram dengan mencantumkan judul dan/atau keterangan yang jelas, sehingga mudah dibaca dan dipahami. The Annual Report may present information in the form of pictures, graphs, tables, and/or diagrams by including clear titles and/or descriptions, so that they are easy to read and understand.	

Keterangan Description	**Halaman** Page
Laporan Tahunan yang disajikan dalam bentuk dokumen elektronik merupakan Laporan Tahunan yang dikonversi dalam *Portable Document Format* (PDF). The Annual Report presented in the form of an electronic document is the Annual Report converted into a portable document format (PDF).	
Isi Laporan Tahunan Annual Report Contents	
Laporan Tahunan paling sedikit memuat: The Annual Report shall at least contain:	
a. ikhtisar data keuangan penting; overview of important financial data;	
b. informasi saham (jika ada); stock information (if any);	
c. laporan Direksi; report of the Board of Directors;	
d. laporan Dewan Komisaris; report of the Board of Commissioners;	
e. profil Emiten atau Perusahaan Publik; profile of the Issuer or Public Company;	
f. analisis dan pembahasan manajemen; management analysis and discussion;	
g. tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik; governance of Issuers or Public Companies;	
h. tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik; social and environmental responsibility of the Issuer or Public Company;	
i. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan audited annual financial report; and	
j. surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan. statement letter of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners regarding their responsibility for the Annual Report.	
Uraian Isi Laporan Tahunan Description of Annual Report Contents	
a. Ikhtisar Data Keuangan Penting Ikhtisar data keuangan penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun, paling sedikit memuat: Summary of Important Financial Data Summary of important financial data containing financial information that is presented in the form of a comparison for 3 (three) fiscal years or since starting its business if the Issuer or Public Company has carried out its business activities for less than 3 (three) years, at least containing:	
» pendapatan/penjualan; income/sales;	
» laba bruto; gross profit;	
» laba (rugi); profit (loss);	
» jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali; the amount of profit (loss) attributable to owners of the parent entity and non-controlling interests;	
» total laba (rugi) komprehensif; total comprehensive profit (loss);	
» jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali; total comprehensive profit (loss) attributable to owners of the parent entity and non-controlling interests;	
» laba (rugi) per saham; earning (loss) per share;	
» jumlah aset; total assets;	

Keterangan Description	Halaman Page
» jumlah liabilitas; total liabilities;	
» jumlah ekuitas; total equity;	
» rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset; ratio of profit (loss) to total assets;	
» rasio laba (rugi) terhadap ekuitas; ratio of profit (loss) to equity;	
» rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/penjualan; ratio of profit (loss) to revenue/sales;	
» rasio lancar; current ratio;	
» rasio liabilitas terhadap ekuitas; ratio of liabilities to equity;	
» rasio liabilitas terhadap jumlah aset; dan ratio of liabilities to total assets; and	
» informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan Emiten atau Perusahaan Publik dan jenis industrinya. other information and financial ratios relevant to the Issuer or Public Company and the type of industry.	
b. Informasi Saham Informasi saham bagi Perusahaan Terbuka paling sedikit memuat: Stock Information Stock information for a Public Company shall at least contain:	
» saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit memuat: shares that have been issued for each quarterly period presented in the form of a comparison for the last 2 (two) fiscal years, at least containing:	
• jumlah saham yang beredar; number of shares outstanding;	
• kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan; market capitalization based on the price on the stock exchange where the shares are listed;	
• harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan; dan the highest, lowest, and closing share prices based on prices on the stock exchange where the shares are listed; and	
• volume perdagangan pada bursa efek tempat saham dicatatkan. trading volume on the stock exchange where the shares are listed.	
Informasi dalam huruf b), huruf c) dan huruf d) hanya diungkapkan jika sahamnya tercatat di bursa efek; Information in letter b), letter c) and letter d) is only disclosed if the shares are listed on a stock exchange;	
dalam hal terjadi aksi korporasi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada saham, seperti pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham bonus, perubahan nilai nominal saham, penerbitan efek konversi, serta penambahan dan pengurangan modal, informasi saham sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditambahkan penjelasan paling sedikit mengenai: in the event of a corporate actions that causes changes in shares, such as stock splits, reverse stock, stock dividends, bonus shares, changes in the nominal value of shares, issuance of conversion securities, as well as capital additions and deductions, stock information as referred to in number 1) shall be added with at least an explanation regarding:	
a. tanggal pelaksanaan aksi korporasi; the date of implementation of the corporate action;	
b. rasio pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham bonus, jumlah efek konversi yang diterbitkan, dan perubahan nilai nominal saham; the ratio of stock splits, reverse stock, stock dividends, bonus shares, the number of convertible securities issued, and changes in the nominal value of shares;	
c. jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi; the number of outstanding shares before and after the corporate action;	
d. jumlah efek konversi yang dilaksanakan (jika ada); dan the number of convertible securities exercised (if any); and	
e. harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi; the share price before and after the corporate action;	

Keterangan Description	**Halaman** Page
dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau pembatalan pencatatan saham (*delisting*) dalam tahun buku, dijelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau pembatalan pencatatan saham (*delisting*) tersebut; dan in the event of a temporary suspension of share trading (suspension) and/or delisting of shares in the fiscal year, the reasons for the suspension and/or delisting of shares shall be explained; and	
dalam hal penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan/atau proses pembatalan pencatatan saham (*delisting*) masih berlangsung hingga akhir periode Laporan Tahunan, dijelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau pembatalan pencatatan saham (*delisting*) tersebut. in the event that the temporary suspension of share trading as referred to in number 3) and/or the delisting process is still ongoing until the end of the Annual Report period, it explains the actions taken to resolve the temporary suspension of share trading and/or cancellation of the share listing (delisting).	
Laporan Direksi Board of Directors' Report	
Laporan Direksi paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: The Board of Directors' report shall at least contain a brief description of:	
a. kinerja Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: performance of the Issuer or Public Company, at least containing:	
» strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik; strategy and strategic policies of the Issuer or Public Company;	
» peranan Direksi dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik; role of the Board of Directors in formulating strategies and strategic policies of Issuers or Public Companies;	
» proses yang dilakukan Direksi untuk memastikan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik; process carried out by the Board of Directors to ensure the implementation of the Issuer's or Public Company's strategy;	
» perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan Emiten atau Perusahaan Publik; dan comparison between the results achieved and those targeted by the Issuer or Public Company; and	
» kendala yang dihadapi Emiten atau Perusahaan Publik; obstacles faced by Issuers or Public Companies;	
b. gambaran tentang prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik; dan description of the business prospects of the Issuer or Public Company; and	
c. penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik. implementation of the governance of Issuers or Public Companies.	
Laporan Dewan Komisaris Board of Commissioners' Report	
Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: The Board of Commissioners' report shall at least contain a brief description of:	
a. penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk pengawasan Dewan Komisaris dalam perumusan dan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik yang dilakukan oleh Direksi; evaluation of the performance of the Board of Directors regarding the management of Issuers or Public Companies, including the supervision of the Board of Commissioners in the formulation and implementation of strategies for Issuers or Public Companies carried out by the Board of Directors;	
b. pandangan atas prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik yang disusun oleh Direksi; dan views on the business prospects of the Issuer or Public Company prepared by the Board of Directors; and	
c. pandangan atas penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik. views on the implementation of governance of the Issuer or Public Company.	

Keterangan Description	**Halaman** Page
Profil Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat informasi: The profile of the Issuer or Public Company contains at least the following information:	
a. nama Emiten atau Perusahaan Publik termasuk apabila terdapat perubahan nama, alasan perubahan, dan tanggal efektif perubahan nama pada tahun buku; name of the Issuer or Public Company, including if there is a change in name, the reason for the change, and the effective date of the name change in the fiscal year;	
b. akses terhadap Emiten atau Perusahaan Publik termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi: access to Issuers or Public Companies including branch offices or representative offices that enable the public to obtain information about Issuers or Public Companies, including:	
» alamat; address;	
» nomor telepon; telephone number;	
» alamat surat elektronik; dan e-mail address; and	
» alamat situs web; website address;	
c. riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik; brief history of the Issuer or Public Company;	
d. visi dan misi Emiten atau Perusahaan Publik serta budaya perusahaan (*corporate culture*) atau nilai-nilai perusahaan; vision and mission of the Issuer or Public Company as well as the corporate culture or corporate values;	
e. kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku, serta jenis barang dan/atau jasa yang dihasilkan; business activities according to the latest articles of association, business activities carried out in the fiscal year, as well as types of goods and/or services produced;	
f. wilayah operasional Emiten atau Perusahaan Publik; wilayah operasional merupakan wilayah atau daerah pelaksanaan kegiatan operasional atau jangkauan dari kegiatan operasional perusahaan. operational area of the Issuer or Public Company; operational area is the area or area for the implementation of operational activities or the range of the company's operational activities.	
g. struktur organisasi Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi termasuk komite di bawah Direksi (jika ada) dan komite di bawah Dewan Komisaris, disertai dengan nama dan jabatan; organizational structure of the Issuer or Public Company in the form of a chart, at least up to the structure of 1 (one) level below the Board of Directors including committees under the Board of Directors (if any) and committees under the Board of Commissioners, accompanied by names and positions;	
h. daftar keanggotaan asosiasi industri baik dalam skala nasional maupun internasional yang berkaitan dengan penerapan keuangan berkelanjutan; list of industry association memberships both on a national and international scale related to the implementation of sustainable finance;	
i. profil Direksi, paling sedikit memuat: Directors' profile, at least containing:	

Keterangan Description	**Halaman** Page
» nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab; name and position in accordance with the duties and responsibilities;	
» foto terbaru; recent photograph;	
» usia; age;	
» kewarganegaraan; nationality;	
» riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi; education history and/or certification;	
» riwayat jabatan, meliputi informasi: position history, including information on:	
j. dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Direksi pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; the legal basis for appointment as a member of the Board of Directors of the Issuer or Public Company concerned;	
k. rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan concurrent positions, either as a member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, and/or committee member as well as other positions both inside and outside the Issuer or Public Company. In the event that a member of the Board of Directors does not have concurrent positions, then this is disclosed; and	
l. pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;	
» hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut; dan affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, majority and controlling shareholders, either directly or indirectly to individual owners, including names of affiliated parties. In the event that a member of the Board of Directors has no affiliation, the Issuer or Public Company shall disclose this matter; and	
» perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; changes in the composition of the members of the Board of Directors and the reasons for the changes. In the event that there is no change in the composition of the members of the Board of Directors, this matter shall be disclosed;	

Keterangan Description	Halaman Page
a. profil Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: profile of the Board of Commissioners, at least containing:	
» nama dan jabatan; name and position;	
» foto terbaru; recent photograph;	
» usia; age;	
» kewarganegaraan; nationality;	
» riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi; education history and/or certification;	
» riwayat jabatan, meliputi informasi: position history, including information on:	
b. dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris; legal basis for appointment as member of the Board of Commissioners;	
c. dasar hukum pengangkatan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan komisaris independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; legal basis for the first appointment as a member of the Board of Commissioners who is an independent commissioner of the Issuer or Public Company concerned;	
d. rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or committee member as well as other positions both inside and outside the Issuer or Public Company. In the event that a member of the Board of Commissioners does not have concurrent positions, then this is disclosed; and	
e. pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;	
» hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi; Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut; affiliation with other members of the Board of Commissioners, major shareholders, and controllers either directly or indirectly to individual owners, including names of affiliated parties; In the event that a member of the Board of Commissioners has no affiliation, the Issuer or Public Company shall disclose this matter;	
» pernyataan independensi komisaris independen dalam hal komisaris independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode; dan statement of independence of the independent commissioner in the event that the independent commissioner has served more than 2 (two) terms; and	
» perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; changes in the composition of the members of the Board of Commissioners and the reasons for the changes. In the event that there is no change in the composition of the members of the Board of Commissioners, this matter shall be disclosed;	
dalam hal terdapat perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan, susunan yang dicantumkan dalam Laporan Tahunan adalah susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terakhir dan sebelumnya; in the event that there is a change in the composition of the members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners that occurs after the fiscal year ends up to the deadline for submitting the Annual Report, the composition included in the Annual Report is the last and previous composition of the members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;	
jumlah karyawan menurut jenis kelamin, jabatan, usia, tingkat pendidikan, dan status ketenagakerjaan (tetap/kontrak) dalam tahun buku; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. number of employees by gender, position, age, education level, and employment status (permanent/contracted) in the fiscal year; Disclosure of information can be presented in tabular form.	
nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada awal dan akhir tahun buku, yang terdiri dari informasi mengenai: names of shareholders and percentage of ownership at the beginning and end of the fiscal year, which consists of information regarding:	

Keterangan Description	**Halaman** Page
a. pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik; shareholders who own 5% (five percent) or more shares of the Issuer or Public Company;	
b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners who own shares of the Issuer or Public Company. In the event that all members of the Board of Directors and/or all members of the Board of Commissioners do not own shares, then this matter is disclosed; and	
c. kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham Emiten atau Perusahaan Publik; community shareholder group, namely the group of shareholders who each own less than 5% (five percent) of the shares of the Issuer or Public Company;	
Informasi di atas dapat disajikan dalam bentuk tabel. The above information can be presented in tabular form.	
persentase kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada awal dan akhir tahun buku, termasuk informasi mengenai pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham untuk kepentingan kepemilikan tidak langsung anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; the percentage of indirect ownership of the shares of the Issuer or Public Company by members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners at the beginning and end of the fiscal year, including information on shareholders registered in the shareholder register for the benefit of indirect ownership of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners;	
Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. In the event that all members of the Board of Directors and/or all members of the Board of Commissioners do not have indirect ownership of the shares of the Issuer or Public Company, this matter shall be disclosed.	
jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan klasifikasi: number of shareholders and percentage of ownership at the end of the fiscal year based on classification:	
a. kepemilikan institusi lokal; ownership in local institutions;	
b. kepemilikan institusi asing; ownership in foreign institutions;	
c. kepemilikan individu lokal; dan local individual ownership; and	
d. kepemilikan individu asing; foreign individual ownership;	
informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan; information regarding the majority and controlling shareholders of the Issuer or Public Company, either directly or indirectly, up to the individual owner, which is presented in the form of a schematic or chart;	
nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas (jika ada), beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama; Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut. the name of the subsidiary, associate, joint venture company where the Issuer or Public Company has joint control of the entity (if any), along with the percentage of share ownership, line of business, total assets, and operating status of the subsidiary, associated company, joint venture company; For a subsidiary, information about the address of the subsidiary is added.	
kronologis pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama bursa efek dimana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatatkan, termasuk pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, pelaksanaan efek konversi, pelaksanaan penambahan dan pengurangan modal (jika ada); chronology of share listing, number of shares, nominal value, and offering price from the beginning of listing to the end of the fiscal year as well as the name of the stock exchange where the shares of the Issuer or Public Company are listed, including stock splits, reverse stock, dividends shares, bonus shares, and changes in the nominal value of shares, implementation of conversion effects, implementation of capital additions and subtractions (if any);	
informasi pencatatan efek lainnya selain efek sebagaimana dimaksud pada angka 18), yang belum jatuh tempo pada tahun buku paling sedikit memuat nama efek, tahun penerbitan, tingkat suku bunga/imbal hasil, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat efek (jika ada); other securities listing information other than the securities as referred to in number 18), which have not yet matured in the fiscal year, at least contain the name of the securities, year of issue, interest rate/yield, maturity date, offering value, and securities rating (if any);	

Keterangan Description	Halaman Page
informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP) beserta jaringan/asosiasi/aliansinya meliputi: 20) information on the use of a public accountant (AP) and a public accounting firm (KAP) services and their networks/associations/alliances include:	
a. nama dan alamat; name and address;	
b. periode penugasan; assignment period;	
c. informasi jasa audit dan/atau non audit yang diberikan; information on audit and/or non-audit services provided;	
d. biaya jasa (*fee*) audit dan/atau non audit untuk masing-masing penugasan yang diberikan selama tahun buku; dan audit and/or non-audit fees for each assignment given during the fiscal year; and	
e. dalam hal AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya, yang ditunjuk tidak memberikan jasa non audit, maka diungkapkan mengenai informasi tersebut; dan in the event that AP and KAP and their network/association/alliance, which are appointed do not provide non-audit services, then the information is disclosed; and	
Pengungkapan informasi penggunaan jasa AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya dapat disajikan dalam bentuk tabel. Disclosure of information on the use of AP and KAP services and their networks/associations/alliances can be presented in tabular form.	
nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal selain AP dan KAP name and address of capital market supporting institutions and/or professionals other than AP and KAP	
Analisis dan Pembahasan Manajemen **Management Analysis and Discussion**	
Analisis dan pembahasan manajemen memuat analisis dan pembahasan mengenai laporan keuangan dan informasi penting lainnya dengan penekanan pada perubahan material yang terjadi dalam tahun buku, yaitu paling sedikit memuat: Management analysis and discussion contains analysis and discussion of financial statements and other important information with an emphasis on material changes that occurred in the fiscal year, which at least contains:	
tinjauan operasi per segmen usaha sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai: a review of operations per business segment according to the type of industry of the Issuer or Public Company, at least regarding:	
a. produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya; production, which includes the process, capacity, and development;	353-359
b. pendapatan/penjualan; dan income/sales; and	359-367
c. profitabilitas; profitability;	359-367
kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir, penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, paling sedikit mengenai: comprehensive financial performance which includes a comparison of financial performance in the last 2 (two) fiscal years, an explanation of the causes of the changes and the impact of these changes, at least regarding:	
a. aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset; current assets, non-current assets, and total assets;	382-396
b. liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas; current liabilities, long term liabilities, and total liabilities;	396-406
c. ekuitas; equity;	407
d. pendapatan/penjualan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif; dan income/sales, expenses, profit (loss), other comprehensive income, and total comprehensive profit (loss); and	411-420
e. arus kas; cash flows;	424
kemampuan membayar utang atau kewajiban dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan; ability to pay debts or obligations by presenting the relevant ratio calculations;	425-426

Keterangan Description	**Halaman** Page
tingkat kolektibilitas piutang Emiten atau Perusahaan Publik dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan; collectibility level of the Issuer's or Public Company's receivables by presenting the relevant ratio calculations;	427-428
struktur modal (*capital structure*) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (*capital structure*) tersebut disertai dasar penentuan kebijakan dimaksud; capital structure and management policies on the capital structure with the basis for determining the said policy;	428-429
bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan paling sedikit memuat: discussion of material ties for capital goods investment with an explanation that at least contains:	
a. tujuan dari ikatan tersebut; the purpose of the bond;	430
b. sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut; the expected source of funds to fulfill the commitment;	430
c. mata uang yang menjadi denominasi; dan the currency in which it is denominated; and	430
d. langkah yang direncanakan Emiten atau Perusahaan Publik untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait; steps that are planned by the Issuer or Public Company to protect the risk from the related foreign currency position;	430
bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan dalam tahun buku terakhir, paling sedikit memuat: discussion of capital goods investments realized in the last fiscal year, at least contains:	
a. jenis investasi barang modal; type of capital goods investment;	432
b. tujuan investasi barang modal; dan the purpose of capital goods investment; and	435
c. nilai investasi barang modal yang dikeluarkan; the total of capital goods investments;	432
informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan (jika ada); information and material facts occurring after the date of the accountant's report (if any);	435
prospek usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya; the business prospects of the Issuer or Public Company are related to the conditions of the industry, the general economy and the international market accompanied by quantitative supporting data from reliable data sources;	435-442
perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), mengenai: comparison between the target/projection at the beginning of the fiscal year with the results achieved (realization), regarding:	
a. pendapatan/penjualan; income/sales;	445
b. laba (rugi); profit (loss);	445
c. struktur modal (*capital structure*); atau capital structure; or	446
d. hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik; other matters deemed important to the Issuer or Public Company;	442-444, 446-451
target/proyeksi yang ingin dicapai Emiten atau Perusahaan Publik untuk 1 (satu) tahun mendatang, mengenai: targets/projections to be achieved by the Issuer or Public Company for the next 1 (one) year, regarding:	
a. pendapatan/penjualan; income/sales;	453
b. laba (rugi); profit (loss);	453
c. struktur modal (*capital structure*); capital structure;	453
d. kebijakan dividen; atau dividend policy; or	454
e. hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik; other matters deemed important to the Issuer or Public Company;	454-458

Keterangan Description	**Halaman** Page
aspek pemasaran atas barang dan/atau jasa Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar; marketing aspects of the goods and/or services of the Issuer or Public Company, at least regarding the marketing strategy and market share;	346-352
uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit: description of dividends for the last 2 (two) fiscal years, at least:	
a. kebijakan dividen, antara lain memuat informasi persentase jumlah dividen yang dibagikan terhadap laba bersih; dividend policy, which includes information on the percentage of dividends distributed to net income;	460-461
b. tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen non kas; date of payment of cash dividends and/or date of distribution of non-cash dividends;	461
c. jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas); dan the amount of dividends per share (cash and/or non-cash); and	461
d. jumlah dividen per tahun yang dibayar; the amount of dividends paid annually;	461
Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak membagikan dividen dalam 2 (dua) tahun terakhir, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. Disclosure of information can be presented in tabular form. In the event that the Issuer or Public Company does not distribute dividends in the last 2 (two) years, this matter shall be disclosed.	
Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, dengan ketentuan: 14) realization of the use of proceeds from the public offering, provided that:	
a. dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku; dan in the event that during the fiscal year, the Issuer has an obligation to submit a report on the realization of the use of funds, then the realization of the cumulative use of the proceeds from the public offering shall be disclosed until the end of the fiscal year; and	461
b. dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, maka Emiten menjelaskan perubahan tersebut; in the event that there is a change in the use of funds as regulated in the Financial Services Authority Regulation regarding the report on the realization of the use of the proceeds from the public offering, the Issuer shall explain the change;	
Informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi material, transaksi afiliasi, dan transaksi benturan kepentingan, yang terjadi pada tahun buku, paling sedikit memuat: material information (if any), regarding investment, expansion, divestment, business merger/consolidation, acquisition, debt/capital restructuring, material transactions, affiliated transactions, and conflict of interest transactions, which occurred during the fiscal year, at least containing :	
a. tanggal, nilai, dan objek transaksi; date, value, and object of the transaction;	462-464, 470-471
b. nama pihak yang melakukan transaksi; name of the party conducting the transaction;	463, 467-470
c. sifat hubungan afiliasi (jika ada); nature of the affiliation relationship (if any);	467-470
d. penjelasan mengenai kewajaran transaksi; explanation of the fairness of the transaction;	470
e. pemenuhan ketentuan terkait; dan compliance with related provisions; and	471
f. dalam hal terdapat hubungan afiliasi, selain mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a) sampai dengan huruf e), Emiten atau Perusahaan Publik juga mengungkapkan informasi: in the event that there is an affiliation relationship, apart from disclosing the information as referred to in letter a) to letter e), the Issuer or Public Company also discloses information:	
pernyataan Direksi bahwa transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*armslength principle*); dan (1) a statement from the Board of Directors that the affiliate transaction has gone through adequate procedures to ensure that the affiliate transaction is carried out in accordance with generally accepted business practices, by complying with the arms-length principle; and	472

Keterangan Description	Halaman Page
peran Dewan Komisaris dan komite audit dalam melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*armslength principle*); (2) the role of the Board of Commissioners and the audit committee in carrying out adequate procedures to ensure that affiliated transactions are carried out in accordance with generally accepted business practices, by complying with the arms-length principle;	472
untuk transaksi afiliasi atau transaksi material yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, ditambahkan penjelasan bahwa transaksi afiliasi atau transaksi material tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan; g) for affiliated transactions or material transactions which are business activities carried out to generate business income and are carried out regularly, repeatedly, and/or continuously, an explanation is added that the affiliated transactions or material transactions are business activities carried out to generate operating income. and run regularly, repeatedly, and/or continuously;	471
Dalam hal transaksi afiliasi atau transaksi material dimaksud telah diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan, ditambahkan informasi mengenai rujukan pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan tersebut. In the event that the affiliated transactions or material transactions referred to have been disclosed in the annual financial statements, additional information regarding the disclosure reference in the annual financial statements is added.	471
untuk pengungkapan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang merupakan hasil pelaksanaan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang telah disetujui pemegang saham independen, ditambahkan informasi mengenai tanggal pelaksanaan RUPS yang menyetujui transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan tersebut; h) for disclosure of affiliated transactions and/or conflict of interest transactions resulting from the implementation of affiliated transactions and/or conflict of interest transactions that have been approved by independent shareholders, additional information regarding the date of the GMS which approved the affiliated transactions and/or conflict of interest transactions is added;	N/A
dalam hal tidak terdapat transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; in the event that there is no affiliated transaction and/or conflict of interest transaction, then this shall be disclosed;	466-472
perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada); dan changes in the provisions of laws and regulations that have a significant effect on Issuers or Public Companies and their impact on financial statements (if any); and	472-483
perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada). changes in accounting policies, reasons and impact on financial statements (if any).	483-484
Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik **Issuer or Public Company Governance**	
Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: The governance of the Issuer or Public Company shall at least contain a brief description of:	
a. RUPS, paling sedikit memuat: GMS, at least contains:	
» Informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku meliputi: Information regarding the resolutions of the GMS in the fiscal year and 1 (one) year prior to the fiscal year include:	
Keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang direalisasikan pada tahun buku; dan (1) resolutions of the GMS in the fiscal year and 1 (one) year before the fiscal year realized in the fiscal year; and	496-534
Keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang belum direalisasikan beserta alasan belum direalisasikan; (2) resolutions of the GMS in the fiscal year and 1 (one) year before the fiscal year that have not been realized and the reasons for not realizing them;	
b. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menggunakan pihak independen dalam pelaksanaan RUPS untuk melakukan perhitungan suara, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; in the event that the Issuer or Public Company uses an independent party in the conduct of the GMS to calculate the votes, then this matter shall be disclosed;	
Direksi, paling sedikit memuat: **The Board of Directors, at least contains:**	

Keterangan Description	**Halaman** Page
Tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; a. Informasi mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi diuraikan dan dapat disajikan dalam bentuk tabel. duties and responsibilities of each member of the Board of Directors; Information regarding the duties and responsibilities of each member of the Board of Directors is described and can be presented in tabular form.	536-545
b. Pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (*charter*) Direksi; statement that the Board of Directors has guidelines or charter for the Board of Directors;	546-547
c. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS; Informasi tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel. policies and implementation of the frequency of meetings of the Board of Directors, meetings of the Board of Directors with the Board of Commissioners, and the level of attendance of members of the Board of Directors in the meeting including attendance at the GMS;	550-569
d. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi: training and/or competency development of members of the Board of Directors:	570-574
» kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi, termasuk program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diangkat (jika ada); dan policies for training and/or improving the competence of members of the Board of Directors, including an orientation program for newly appointed members of the Board of Directors (if any); and	
» pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Direksi dalam tahun buku (jika ada); training and/or competency improvement attended by members of the Board of Directors in the fiscal year (if any);	
e. penilaian Direksi terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi pada tahun buku paling sedikit memuat: the Board of Directors' assessment of the performance of the committees that support the implementation of the Board of Directors' duties for the fiscal year shall at least contain:	575-576
» prosedur penilaian kinerja; dan performance appraisal procedures; and	
» kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan the criteria used are performance achievements during the fiscal year, are competence and attendance at meetings; and	
f. dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. in the event that the Issuer or Public Company does not have a committee that supports the implementation of the duties of the Board of Directors, this matter shall be disclosed.	
Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: The Board of Commissioners, at least contains:	
a. tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; duties and responsibilities of the Board of Commissioners;	577-579
b. pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (*charter*) Dewan Komisaris; a statement that the Board of Commissioners has guidelines or charter for the Board of Commissioners;	581-582
c. kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS; policies and implementation of the frequency of meetings of the Board of Commissioners, meetings of the Board of Commissioners with the Board of Directors and the level of attendance of members of the Board of Commissioners in these meetings including attendance at the GMS;	587-613
Informasi tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel. Information on the level of attendance of members of the Board of Commissioners at the meeting of the Board of Commissioners, the meeting of the Board of Commissioners with the Board of Directors, or the GMS can be presented in tabular form.	

Keterangan Description	**Halaman** Page
d. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris: training and/or competency improvement of members of the Board of Commissioners:	
» kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris, termasuk program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat (jika ada); dan policy on competency training and/or development of members of the Board of Commissioners, including orientation programs for newly appointed members of the Board of Commissioners (if any); and	614-617
» pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Dewan Komisaris dalam tahun buku (jika ada); competency training and/or development attended by members of the Board of Commissioners in the fiscal year (if any);	
e. penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris serta masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: performance appraisal of the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as each member of the Board of Directors and the Board of Commissioners, at least containing:	
» prosedur pelaksanaan penilaian kinerja; procedures for implementing performance appraisals;	618-637
» kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan criteria used are performance achievements during the fiscal year, competency and attendance at meetings; and	
» pihak yang melakukan penilaian; dan party conducting the assessment; and	
f. penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja Komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris pada tahun buku meliputi: Board of Commissioners' assessment of the performance of the Committees that support the implementation of the duties of the Board of Commissioners in the fiscal year includes:	
» prosedur penilaian kinerja; dan performance appraisal procedures; and	638
» kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; the criteria used are performance achievements during the fiscal year, competency and attendance at meetings;	
Nominasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: **The nomination and remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners shall at least contain:**	
a. prosedur nominasi, meliputi uraian singkat mengenai kebijakan dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan nomination procedure, including a brief description of the policies and process for nomination of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners; and	643
b. prosedur dan pelaksanaan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain: procedures and implementation of remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners, among others:	
» prosedur penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris; procedures for determining remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners;	644
» struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris seperti, gaji, tunjangan, tantiem/bonus dan lainnya; dan the remuneration structure of the Board of Directors and the Board of Commissioners such as salary, allowances, tantiem/bonus and others; and	645-646
» besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. the amount of remuneration for each member of the Board of Directors and member of the Board of Commissioners; Disclosure of information can be presented in tabular form.	646-647

Keterangan Description	Halaman Page
Dewan pengawas syariah, bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar, paling sedikit memuat: The sharia supervisory board, for Issuers or Public Companies that carry out business activities based on sharia principles as stated in the articles of association, shall at least contain:	N/A
a. nama; name;	
b. dasar hukum pengangkatan dewan pengawas syariah; legal basis for the appointment of the sharia supervisory board;	
c. periode penugasan dewan pengawas syariah; period of assignment of the sharia supervisory board;	
d. tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah; dan duties and responsibilities of the sharia supervisory board; and	
e. frekuensi dan cara pemberian nasihat dan saran serta pengawasan pemenuhan prinsip syariah di pasar modal terhadap Emiten atau Perusahaan Publik; frequency and method of providing advice and suggestions as well as supervising the fulfillment of sharia principles in the capital market to Issuers or Public Companies;	
Komite audit, paling sedikit memuat: **The audit committee, at least contains:**	
a. nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; name and position in committee membership;	
b. usia; age;	
c. kewarganegaraan; nationality;	
d. riwayat pendidikan; educational history;	
e. riwayat jabatan, meliputi informasi: position history, including information on:	
» dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; legal basis for appointment as committee member;	653-655
» rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or member of the committee as well as other positions (if any); and	
» pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;	
f. periode dan masa jabatan anggota komite audit; period and term of office of the audit committee members;	
g. pernyataan independensi komite audit; statement of independence of the audit committee;	656-657
h. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); training and/or competency improvement that have been followed in the fiscal year (if any);	657
i. kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite audit dan tingkat kehadiran anggota komite audit dalam rapat tersebut; dan policies and implementation of the frequency of audit committee meetings and the level of attendance of audit committee members in those meetings; and	658-661
j. pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam pedoman atau piagam (*charter*) komite audit; the implementation of the audit committee's activities for the fiscal year in accordance with the guidelines or charter of the audit committee;	661-662

Keterangan Description	**Halaman** Page
komite atau fungsi nominasi dan remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: the nomination and remuneration committee or function of the Issuer or Public Company, at least containing:	
a. nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; name and position in committee membership;	
b. usia; age;	
c. kewarganegaraan; nationality;	
d. riwayat pendidikan; educational history;	
e. riwayat jabatan, meliputi informasi: position history, including information on:	
» dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; legal basis for appointment as committee member;	665-667
» rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or committee member and other positions (if any); and	
» pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;	
f. periode dan masa jabatan anggota komite; period and term of office of the committee members;	
g. pernyataan independensi komite; statement of committee independence;	668
h. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); training and/or competency improvement that have been followed in the fiscal year (if any);	669
i. uraian tugas dan tanggung jawab; description of duties and responsibilities;	663
j. pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (*charter*); a statement that it has a guideline or charter;	664
k. kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut; policies and implementation of the frequency of meetings and the level of attendance of members at the meeting;	669-672
l. uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku; dan brief description of the implementation of activities in the fiscal year; and	672-673
m. dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, Emiten atau Perusahaan Publik cukup mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf i) sampai dengan huruf l) dan mengungkapkan: in the event that no nomination and remuneration committee is formed, the Issuer or Public Company is sufficient to disclose the information as referred to in letter i) to letter l) and disclose:	
» alasan tidak dibentuknya komite; dan reasons for not forming the committee; and	
» pihak yang melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi; the party carrying out the nomination and remuneration function;	
komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi (jika ada) dan/atau komite yang mendukung fungsi dan tugas Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: other committees owned by Issuers or Public Companies in order to support the functions and duties of the Board of Directors (if any) and/or committees that support the functions and duties of the Board of Commissioners, at least containing:	

Keterangan Description	Halaman Page
a. nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; name and position in committee membership;	677-679, 688-693
b. usia; age;	
c. riwayat pendidikan; educational history;	
d. riwayat jabatan, meliputi informasi: position history, including information on:	
» dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; legal basis for appointment as committee member;	
» rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or committee member and other positions (if any); and	
» pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;	
e. periode dan masa jabatan anggota komite; period and term of office of the committee members;	
f. pernyataan independensi komite; statement of committee independence;	680, 694-695
g. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan training and/or competency improvement that have been followed in the fiscal year (if any); and	681-682, 696
h. uraian tugas dan tanggung jawab; description of duties and responsibilities;	674-675, 686-687
i. pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (*charter*) komite; a statement that the committee has had guidelines or charters;	674, 687
j. kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut; dan policies and implementation of the frequency of committee meetings and the level of attendance of committee members at the meeting; and	682-684, 696-698
k. uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite pada tahun buku; a brief description of the committee's activities for the fiscal year;	684-686, 698
Sekretaris perusahaan, paling sedikit memuat: Corporate secretary, at least contains:	
a. nama; name;	702-703
b. domisili; domicile;	
c. riwayat jabatan, meliputi: position history, including:	
» dasar hukum penunjukan sebagai sekretaris perusahaan; dan legal basis for appointment as company secretary; and	
» pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;	
d. riwayat pendidikan; educational history;	
e. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku; dan training and/or competency improvement followed during the fiscal year; and	703-704
f. uraian singkat pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku; a brief description of the implementation of the duties of the corporate secretary for the fiscal year;	704-705

Keterangan Description	**Halaman** Page
Unit audit internal, paling sedikit memuat: Internal audit unit, at least contains:	
a. nama kepala unit audit internal; name of the head of the internal audit unit;	
b. riwayat jabatan, meliputi: position history, including:	
» dasar hukum penunjukan sebagai kepala unit audit internal; dan legal basis for the appointment as head of the internal audit unit; and	706
» pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;	
c. kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada); qualification or certification as an internal audit profession (if any);	
d. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku; training and/or competency improvement to be followed during the fiscal year;	707
e. struktur dan kedudukan unit audit internal; structure and position of the internal audit unit;	705-706
f. uraian tugas dan tanggung jawab; description of duties and responsibilities;	708-709
g. pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (*charter*) unit audit internal; dan a statement that the internal audit unit has had guidelines or charters; and	708
h. uraian singkat pelaksanaan tugas unit audit internal pada tahun buku termasuk kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit; a brief description of the implementation of the internal audit unit's duties for the fiscal year including the policy and implementation of the frequency of meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or audit committee;	714-715
uraian mengenai sistem pengendalian internal (internal control) yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: description of the internal control system implemented by the Issuer or Public Company, at least containing:	
a. pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya; financial and operational control, as well as compliance with other laws and regulations;	739-742
b. tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal; dan review of the effectiveness of the internal control system; and	746
c. pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kecukupan sistem pengendalian internal; statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the adequacy of the internal control system;	746
sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: the risk management system implemented by the Issuer or Public Company, at least contains:	
a. gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik; general description of the risk management system of the Issuer or Public Company;	747-754
b. jenis risiko dan cara pengelolaannya; types of risks and how to manage them;	754-766
c. tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik; dan review of the effectiveness of the Issuer's or Public Company's risk management system; and	768
d. pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau komite audit atas kecukupan sistem manajemen risiko; statement of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners or the audit committee on the adequacy of the risk management system;	768
perkara hukum yang berdampak material yang dihadapi oleh Emiten atau Perusahaan Publik, entitas anak, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris (jika ada), paling sedikit memuat: legal cases that have a material impact faced by Issuers or Public Companies, subsidiaries, members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners (if any), at least contain:	770-803
a. pokok perkara/gugatan; subject matter/claim;	
b. status penyelesaian perkara/gugatan; dan status of settlement of cases/claims; and	
c. pengaruhnya terhadap kondisi Emiten atau Perusahaan Publik; effect on the condition of the Issuer or Public Company;	

Keterangan Description	**Halaman** Page
informasi tentang sanksi administratif/sanksi yang dikenakan kepada Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, oleh Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya pada tahun buku (jika ada); 14) information on administrative sanctions/sanctions imposed on Issuers or Public Companies, members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors, by the Financial Services Authority and other authorities for the fiscal year (if any);	803
informasi mengenai kode etik Emiten atau Perusahaan Publik meliputi: 15) information regarding the code of ethics of the Issuer or Public Company includes:	
a. pokok-pokok kode etik; main points of the code of ethics;	810-811
b. bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya; dan form of socialization of the code of ethics and its enforcement efforts; and	812-814
c. pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Emiten atau Perusahaan Publik; a statement that the code of ethics applies to members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of Issuers or Public Companies;	812
uraian singkat mengenai kebijakan pemberian kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan/atau karyawan yang dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (*management stock ownership program*/MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (*employee stock ownership program*/ESOP); 16) a brief description of the policy of providing long-term performance-based compensation to management and/or employees owned by the Issuer or Public Company (if any), including the management stock ownership program (MSOP) and/or program employee stock ownership (ESOP);	815-816
Dalam hal pemberian kompensasi berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (*management stock ownership program*/MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (*employee stock ownership program*/ESOP), informasi yang diungkapkan paling sedikit memuat: In terms of providing compensation in the form of a management stock ownership program (MSOP) and/or an employee stock ownership program (ESOP), the information disclosed must at least contain:	
a. jumlah saham dan/atau opsi; number of shares and/or options;	
b. jangka waktu pelaksanaan; implementation period;	
c. persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan requirements for eligible employees and/or management; and	
d. harga pelaksanaan atau penentuan harga pelaksanaan; exercise price or determination of exercise price;	
uraian singkat mengenai kebijakan pengungkapan informasi mengenai: a brief description of the information disclosure policy regarding:	816
a. kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka; dan a) share ownership of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners no later than 3 (three) working days after the occurrence of ownership or any change in ownership of shares of a Public Company; and	
b. pelaksanaan atas kebijakan dimaksud; implementation of the policy;	
uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) di Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: a description of the whistleblowing system at the Issuer or Public Company, at least containing:	
a. cara penyampaian laporan pelanggaran; method of submitting a violation report;	817-818
b. perlindungan bagi pelapor; protection for whistleblowers;	818-819
c. penanganan pengaduan; complaint handling;	819-820
d. pihak yang mengelola pengaduan; dan party managing the complaint; and	824-825

Keterangan Description	Halaman Page
e. hasil dari penanganan pengaduan, paling sedikit: result of complaint handling, at least:	
» jumlah pengaduan yang masuk dan diproses dalam tahun buku; dan number of complaints received and processed in the fiscal year; and	825-827
» tindak lanjut pengaduan; follow-up on complaints;	
Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*), maka diungkapkan mengenai hal tersebut. In the event that the Issuer or Public Company does not have a whistleblowing system, this matter is disclosed.	
uraian mengenai kebijakan anti korupsi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: a description of the anti-corruption policy of the Issuer or Public Company, at least containing:	
a. program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (*kickbacks*), *fraud*, suap dan/atau gratifikasi dalam Emiten atau Perusahaan Publik; dan programs and procedures implemented in overcoming corrupt practices, kickbacks, fraud, bribery and/or gratification in Issuers or Public Companies; and	827-835
b. pelatihan/sosialisasi anti korupsi kepada karyawan Emiten atau Perusahaan Publik; anti-corruption training/socialization to employees of Issuers or Public Companies;	835-836
Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki kebijakan anti korupsi, maka dijelaskan alasan tidak dimilikinya kebijakan dimaksud. In the event that the Issuer or Public Company does not have an anti-corruption policy, the reasons for not having the said policy are explained.	
penerapan atas pedoman tata kelola Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik, meliputi: implementation of the Public Company governance guidelines for Issuers issuing equity securities or Public Companies, including:	
a. pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan; dan/atau a statement regarding the recommendations that have been implemented; and/or	840-853
b. penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif pelaksanaannya (jika ada). explanation of recommendations that have not been implemented, along with reasons and alternative implementations (if any).	
Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. Disclosure of information can be presented in tabular form.	
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik Social and Environmental Responsibility of Issuers or Public Companies	
Informasi yang diungkapkan dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: The information disclosed in the social and environmental responsibility section is a Sustainability Report as referred to in the Financial Services Authority Regulation Number 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies, at at least includes:	
a. penjelasan strategi keberlanjutan; explanation of the sustainability strategy;	
b. ikhtisar aspek keberlanjutan (ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup); overview of sustainability aspects (economic, social, and environmental);	
c. profil singkat Emiten atau Perusahaan Publik; brief profile of the Issuer or Public Company;	
d. penjelasan Direksi; explanation of the Board of Directors;	
e. tata kelola keberlanjutan; sustainability governance;	
f. kinerja keberlanjutan; sustainability performance;	
g. verifikasi tertulis dari pihak independen, jika ada; written verification from an independent party, if any;	
h. lembar umpan balik (*feedback*) untuk pembaca, jika ada; dan feedback sheet for readers, if any; and	

Keterangan Description	**Halaman** Page
tanggapan Emiten atau Perusahaan Publik terhadap umpan balik laporan tahun sebelumnya; the response of the Issuer or Public Company to the previous year's report feedback;	
Laporan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 1), harus disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; The Sustainability Report as referred to in number 1) must be prepared in accordance with the Technical Guidelines for the Preparation of a Sustainability Report for Issuers and Public Companies as contained in Appendix II which is an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter;	
informasi Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) pada angka 1) dapat: information on the Sustainability Report in number 1) can:	
a. diungkapkan pada bagian lain yang relevan di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan, seperti penjelasan Direksi terkait Laporan Keberlanjutan diungkapkan dalam bagian terkait Laporan Direksi; dan/atau disclosed in other relevant sections outside the social and environmental responsibility section, such as the Directors' explanation regarding the Sustainability Report disclosed in the section related to the Directors' Report; and/or	
b. merujuk pada bagian lain di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan tetap mengacu pada Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, seperti profil Emiten atau Perusahaan Publik; refers to other sections outside the social and environmental responsibility section by still referring to the Technical Guidelines for the Preparation of Sustainability Reports for Issuers and Public Companies as listed in Appendix II which is an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter, such as the profile of the Issuer or Public Company;	
Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) sebagaimana dimaksud pada angka 1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan namun dapat disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan; The Sustainability Report as referred to in number 1) is an inseparable part of the Annual Report but can be presented separately from the Annual Report;	
Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, informasi yang diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan dimaksud harus: In the event that the Sustainability Report is presented separately from the Annual Report, the information disclosed in the Sustainability Report must:	
a. memuat seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1); dan contains all the information as referred to in number 1); and	
b. disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; prepared in accordance with the Technical Guidelines for the Preparation of a Sustainability Report for Issuers and Public Companies as listed in Appendix II which is an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter;	
Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, maka dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan memuat informasi bahwa informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan telah diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan yang disajikan secara terpisah dari Laporan Tahunan; dan In the event that the Sustainability Report is presented separately from the Annual Report, then the social and environmental responsibility section contains information that information on social and environmental responsibility has been disclosed in the Sustainability Report which is presented separately from the Annual Report; and	
Penyampaian Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) yang disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan harus disampaikan bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan. Submission of the Sustainability Report which is presented separately from the Annual Report must be submitted together with the Annual Report.	

Keterangan Description	**Halaman** Page
Laporan Keuangan Tahunan yang Telah Diaudit Audited Annual Financial Report	
Laporan keuangan tahunan yang dimuat dalam Laporan Tahunan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Laporan keuangan tahunan dimaksud memuat pernyataan mengenai pertanggungjawaban atas laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tanggung jawab Direksi atas laporan keuangan atau peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai laporan berkala perusahaan efek dalam hal Emiten merupakan perusahaan efek. The annual financial reports contained in the Annual Report are prepared in accordance with financial accounting standards in Indonesia and have been audited by a public accountant registered with the Financial Services Authority. The said annual financial report contains a statement regarding the accountability for financial statements as regulated in the Financial Services Authority Regulation regarding the Board of Directors' responsibility for financial reports or the laws and regulations in the capital market sector which regulates the periodic reports of securities companies in the event that the Issuer is a securities company.	
Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan disusun sesuai dengan format Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. Statement Letters of Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners regarding Responsibilities for the Annual Report Statements of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners regarding the responsibilities of the Annual Report are prepared in accordance with the format of Statement Letters of Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners regarding Responsibilities for the Annual Report as contained in the Appendix I which is an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter.	

Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Pelabuhan Indonesia
dan entitas anaknya/ and its subsidiaries

Laporan keuangan konsolidasian
tanggal 31 Desember 2025
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen/
Consolidated financial statements
as of December 31, 2025 and for the year then ended
with independent auditor's report

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBISIDIARIES
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

Daftar Isi / ***Table of Contents***

	Halaman/ *Page*	
Surat Pernyataan Direksi		*Director's Statement*
Laporan Auditor Independen		*Independent Auditor's Report*
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1-3	*Consolidated Statement of Financial Position*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	4-5	*Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	6	*Consolidated Statement of Changes in Equity*
Laporan Arus Kas Konsolidasian	7-8	*Consolidated Statement of Cash Flows*
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian	9-266	*Notes to the Consolidated Financial Statements*

****

PELINDO
INDONESIA MARITIME GATEWAY

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA DAN ENTITAS ANAKNYA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama/*Name* : Achmad Muchtasyar
   Alamat kantor/*Office address* : Pelindo Tower
   Jl. Yos Sudarso No 9, Kec. Koja,
   Jakarta Utara 14230, Indonesia
   Alamat domisili/sesuai KTP atau kartu identitas lain/*Residential address/in accordance with personal identity card* : Jl. Pintu Air II No. 52
   RT 027 RW 008, Kel. Gandul, Kec. Cinere
   Nomor telepon/*Telephone number* : 021-4301080
   Jabatan/*Title* : Direktur Utama/*President Director*

2. Nama/*Name* : Bachtiar Soeria Atmadja
   Alamat kantor/*Office address* : Pelindo Tower
   Jl. Yos Sudarso No 9, Kec. Koja,
   Jakarta Utara 14230, Indonesia
   Alamat domisili/sesuai KTP atau kartu identitas lain/*Residential address/in accordance with personal identity card* : Jl. Delman Raya No. 26 RT/RW 004/011
   Kel. Kebayoran Lama Utara Kec. Kebayoran lama
   Jakarta Selatan, Indonesia
   Nomor telepon/*Telephone number* : 021-4301080
   Jabatan/*Title* : Direktur Keuangan/*Finance Director*

menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya pada tanggal 31 Desember 2025 dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.
2. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar, dan
   b. Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan dan entitas anaknya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

DIRECTOR'S STATEMENT
ON
THE RESPONSIBILITY FOR
THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES

We, the undersigned:

1. Name : Achmad Muchtasyar
   Office address : Pelindo Tower
   Jl. Yos Sudarso No 9, Kec. Koja,
   Jakarta Utara 14230, Indonesia
   Residential address/in accordance with personal identity card : Jl. Pintu Air II No. 52
   RT 027 RW 008, Kel. Gandul, Kec. Cinere
   Telephone number : 021-4301080
   Title : Direktur Utama/*President Director*

2. Name : Bachtiar Soeria Atmadja
   Office address : Pelindo Tower
   Jl. Yos Sudarso No 9, Kec. Koja,
   Jakarta Utara 14230, Indonesia
   Residential address/in accordance with personal identity card : Jl. Delman Raya No. 26 RT/RW 004/011
   Kel. Kebayoran Lama Utara Kec. Kebayoran lama
   Jakarta Selatan, Indonesia
   Telephone number : 021-4301080
   Title : Direktur Keuangan/*Finance Director*

declare that:

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries as of December 31, 2025 and for the year then ended.*
2. *The consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*
3. a. *All information has been fully and correctly disclosed in the consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries, and*
   b. *The consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries do not contain materially misleading information or facts, and do not conceal any information or facts.*
4. *We are responsible for the Company and its subsidiaries' internal control system.*

This statement is made truthfully.

Jakarta, 31 Maret 2026/*March 31, 2026*

METERAI TEMPEL
6D8BAKX490334336

Achmad Muchtasyar	Bachtiar Soeria Atmadja
Direktur Utama/*President Director*	Direktur Keuangan/*Finance Director*

Shape the future with confidence

KAP Purwanto Susanti dan Surja

Indonesia Stock Exchange Building
Tower 2, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

Tel : +62 21 5289 5000
Fax: +62 21 5289 4100
ey.com/id

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00437/2.1505/AU.1/06/1832-1/1/III/2026

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia ("Perusahaan") dan entitas anaknya (secara kolektif disebut sebagai "Grup") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini kami.

Independent Auditor's Report

Report No. 00437/2.1505/AU.1/06/1832-1/1/III/2026

The Shareholder and the Boards of Commissioners and Directors
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia

Opinion

We have audited the accompanying consolidated financial statements of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia (the "Company") and its subsidiaries (collectively referred to as the "Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2025, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity, and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as of December 31, 2025, and its consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants ("IICPA"). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with such requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Shape the future with confidence

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00437/2.1505/AU.1/06/1832-1/1/III/2026 (lanjutan)

Hal audit utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode kini. Hal audit utama tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, dan kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut. Untuk hal audit utama di bawah ini, penjelasan kami tentang bagaimana audit kami merespons hal tersebut disampaikan dalam konteks tersebut.

Kami telah memenuhi tanggung jawab yang diuraikan dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami, termasuk sehubungan dengan hal audit utama yang dikomunikasikan di bawah ini. Oleh karena itu, audit kami mencakup pelaksanaan prosedur yang didesain untuk merespons penilaian kami atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian terlampir. Hasil prosedur audit kami, termasuk prosedur yang dilakukan untuk merespons hal audit utama di bawah ini, menyediakan basis bagi opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terlampir.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00437/2.1505/AU.1/06/1832-1/1/III/2026 (continued)

Key audit matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. Such key audit matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements taken as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on such key audit matters. For the key audit matter below, our description of how our audit addressed such key audit matter is provided in such context.

We have fulfilled the responsibilities described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report, including in relation to the key audit matter communicated below. Accordingly, our audit included the performance of procedures designed to respond to our assessment of the risks of material misstatement of the accompanying consolidated financial statements. The results of our audit procedures, including the procedures performed to address the key audit matter below, provide the basis for our opinion on the accompanying consolidated financial statements.

A member firm of Ernst & Young Global Limited

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00437/2.1505/AU.1/06/1832-1/1/III/2026 (lanjutan)

Hal audit utama (lanjutan)

Akuntansi Lindung Nilai Arus Kas

Penjelasan atas hal audit utama:

Grup memiliki eksposur terhadap risiko mata uang asing dari pendapatan dan utang obligasi serta pinjaman dalam mata uang Dolar AS karena mata uang fungsional Grup adalah Rupiah. Pada tanggal 1 Januari 2022, 1 Juli 2023, 1 Januari 2025 dan 30 April 2025, Grup menetapkan beberapa hubungan lindung nilai arus kas antara pendapatan kontraktual dan non-kontraktualnya dalam mata uang Dolar AS di masa yang akan datang sebagai item lindung nilaian dan utang obligasi serta pinjaman dalam mata uang Dolar AS yang ada sebagai instrumen lindung nilai. Tujuannya adalah untuk melindungi risiko fluktuasi nilai tukar mata uang atas pendapatan yang diterima dalam mata uang Dolar AS dengan utang obligasi serta pinjaman yang ada dalam mata uang Dolar AS. Kami menganggap ini sebagai hal audit utama dalam audit tahun berjalan karena kompleksitas yang terkait dengan penerapan akuntansi lindung nilai. Penilaian item lindung nilai dan instrumen lindung nilai, penilaian efektivitas lindung nilai dan cadangan lindung nilai, serta penerapan rebalancing hubungan lindung nilai melibatkan model kuantitatif yang kompleks dan pertimbangan signifikan yang terkait dengan asumsi yang diterapkan dalam akuntansi lindung nilai. Disamping itu, perlakuan akuntansi tersebut menghasilkan dampak yang signifikan terhadap saldo-saldo Grup sebagai akibat dari pemilihan untuk menerapkan akuntansi lindung nilai.

Pengungkapan terkait lindung nilai arus kas disajikan dalam Catatan 2v, 25, 26 dan 47 atas laporan keuangan konsolidasian.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00437/2.1505/AU.1/06/1832-1/1/III/2026 (continued)

Key audit matters (continued)

Cash Flow Hedge Accounting

Description of the key audit matter:

The Group is exposed to foreign currency risk from revenue and bonds payable and loan in US Dollars because the Group's functional currency is Rupiah. On January 1, 2022, July 1, 2023, January 1, 2025 and April 30, 2025, the Group designated several cash flow hedge relationships between its future US Dollars contractual and non-contractual revenues as hedged items and its existing US Dollar bonds payables and loans as hedging instruments. The objective is to hedge the risk of exchange rate fluctuation on income received in US Dollars with the existing bonds payables and loans in US Dollars. We consider this as the key audit matter in the current year audit of the consolidated financial statements due to the complexities associated with the application of hedge accounting. The valuation of underlying hedged items and hedging instruments, the assessment of hedge effectiveness and hedge reserve balances, and the application of the rebalancing of hedge relationships involve complex quantitative models and significant judgement associated with the assumptions applied in hedge accounting. Furthermore, the accounting treatment results in a significant impact to the Group balances that arise as a result of the election to apply hedge accounting.

The disclosures related to the cash flow hedge are presented in Notes 2v, 25, 26 and 47 to the consolidated financial statements.

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Shape the future with confidence

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00437/2.1505/AU.1/06/1832-1/1/III/2026 (lanjutan)

Hal audit utama (lanjutan)

Akuntansi Lindung Nilai Arus Kas (lanjutan)

Respons audit:

Kami memeroleh pemahaman tentang strategi manajemen risiko dan tujuan dilakukannya lindung nilai arus kas, serta memeroleh dokumentasi penetapan hubungan lindung nilai arus kas yang dibuat oleh manajemen dan ahli eksternal yang ditunjuk oleh Grup. Kami menilai independensi, kualifikasi dan obyektivitas dari ahli manajemen eksternal tersebut. Kami mengevaluasi apakah penerapan akuntansi lindung nilai arus kas telah sesuai dengan kriteria kualifikasian dan prinsip-prinsip lainnya dalam akuntansi untuk lindung nilai arus kas sesuai dengan PSAK 109: Instrumen Keuangan. Kami menguji asumsi utama yang digunakan dalam model dan membandingkannya dengan informasi yang diperoleh dari sumber input, analisis historis, informasi yang tersedia untuk umum dan pengetahuan industri. Kami menguji akurasi aritmetika dari model yang digunakan dalam penilaian efektivitas serta penerapan lower-of-test. Kami menilai dan menguji dasar dan penerapan rebalancing atas hubungan lindung nilai. Kami juga mengevaluasi kecukupan pengungkapan mengenai hal ini di dalam laporan keuangan konsolidasian terlampir.

Informasi lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam Laporan Tahunan 2025 (“Laporan Tahunan”) selain laporan keuangan konsolidasian terlampir dan laporan auditor independen kami. Laporan Tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor independen ini.

Independent Auditor’s Report (continued)

Report No. 00437/2.1505/AU.1/06/1832-1/1/III/2026 (continued)

Key audit matters (continued)

Cash Flow Hedge Accounting (continued)

Audit response:

We obtained an understanding of the risk management strategy and objective in conducting a cash flow hedge and obtained documentation of the cash flow hedge relationships designation prepared by the management and the external expert engaged by the Group. We assessed the independence, qualification, and objectivity of the external management’s expert. We evaluated whether the cash flow hedge accounting application is in compliance with the qualifying criteria and other principles in accounting for cash flow hedge in accordance with PSAK 109: Financial Instruments. We tested the key assumptions used in the model and compared them with the information obtained from input sources, historical analysis, publicly available information and industry knowledge. We tested the arithmetical accuracy of the model used for effectiveness assessment as well as the application of lower-of-test. We assessed and challenged the bases and application of the rebalancing of hedge relationships. We also evaluated adequacy of disclosures on this matter in the accompanying consolidated financial statements.

Other information

Management is responsible for the other information. Other information comprises the information included in the 2025 Annual Report (“The Annual Report”) other than the accompanying consolidated financial statements and our independent auditor’s report thereon. The Annual Report is expected to be made available to us after the date of this independent auditor’s report.

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00437/2.1505/AU.1/06/1832-1/1/III/2026 (lanjutan)

Informasi lain (lanjutan)

Opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terlampir tidak mencakup Laporan Tahunan, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas Laporan Tahunan tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan konsolidasian terlampir, tanggung jawab kami adalah untuk membaca Laporan Tahunan ketika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah Laporan Tahunan mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca Laporan Tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan melakukan tindakan yang tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00437/2.1505/AU.1/06/1832-1/1/III/2026 (continued)

Other information (continued)

Our opinion on the accompanying consolidated financial statements does not cover the Annual Report, and accordingly, we do not express any form of assurance on the Annual Report.

In connection with our audit of the accompanying consolidated financial statements, our responsibility is to read the Annual Report when it becomes available and, in doing so, consider whether the Annual Report is materially inconsistent with the accompanying consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the Annual Report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions based on the applicable laws and regulations.

Responsibilities of management and those charged with governance for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Shape the future with confidence

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00437/2.1505/AU.1/06/1832-1/1/III/2026 (lanjutan)

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor independen yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00437/2.1505/AU.1/06/1832-1/1/III/2026 (continued)

Responsibilities of management and those charged with governance for the consolidated financial statements (continued)

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern, and using the going concern basis of accounting, unless management either intends to liquidate the Group or to cease its operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements taken as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an independent auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

A member firm of Ernst & Young Global Limited

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00437/2.1505/AU.1/06/1832-1/1/III/2026 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya suatu kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian atas pengendalian internal.

- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Grup.

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00437/2.1505/AU.1/06/1832-1/1/III/2026 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to such risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or override of internal control.

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

Shape the future with confidence

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00437/2.1505/AU.1/06/1832-1/1/III/2026 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor independen kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor independen kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00437/2.1505/AU.1/06/1832-1/1/III/2026 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: (continued)

- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our independent auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusion is based on the audit evidence obtained up to the date of our independent auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.

- Evaluate the overall presentation, structure, and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

A member firm of Ernst & Young Global Limited

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00437/2.1505/AU.1/06/1832-1/1/III/2026 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

- Memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan kepada pihak tersebut seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00437/2.1505/AU.1/06/1832-1/1/III/2026 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: (continued)

- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision, and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Shape the future with confidence

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00437/2.1505/AU.1/06/1832-1/1/III/2026 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama tersebut dalam laporan auditor independen kami kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal audit utama tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal audit utama tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan auditor independen kami karena konsekuensi yang merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00437/2.1505/AU.1/06/1832-1/1/III/2026 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements (continued)

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe such key audit matters in our independent auditor's report unless laws or regulations preclude public disclosure about such key audit matters or when, in extremely rare circumstances, we determine that a key audit matter should not be communicated in our independent auditor's report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

KAP Purwanto Susanti dan Surja

Budi Hartono

Registrasi Akuntan Publik No. AP.1832/Public Accountant Registration No. AP.1832

31 Maret 2026/March 31, 2026

00437

A member firm of Ernst & Young Global Limited

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2025
(Expressed in Thousands of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	Catatan/ *Notes*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
ASET				***ASSETS***
ASET LANCAR				***CURRENT ASSETS***
Kas dan setara kas	15.567.392.704	4,44a,45,46	20.352.943.946	*Cash and cash equivalents*
Investasi jangka pendek	264.233.122	5,44b,45,46	375.942.057	*Short-term investments*
Piutang usaha - neto		6,45,46		*Trade receivables - net*
Pihak ketiga	1.461.815.335		1.557.342.021	*Third parties*
Pihak berelasi	468.936.129	44c	455.819.901	*Related parties*
Piutang lain-lain - neto		7,46		*Other receivables - net*
Pihak ketiga	56.625.405		26.776.429	*Third parties*
Pihak berelasi	149.634.818	44d	154.908.237	*Related parties*
Uang muka dan biaya dibayar di muka	561.941.006	8	413.926.915	*Advances and prepaid expenses*
Aset kontrak - neto		9,46		*Contract assets - net*
Pihak ketiga	42.821.660		105.072.119	*Third parties*
Pihak berelasi	194.673.861	44e	174.234.826	*Related parties*
Persediaan	310.200.546	10	277.992.453	*Inventories*
Pajak dibayar di muka	815.689.473	24a	774.443.272	*Prepaid taxes*
Aset lancar lainnya	1.555.904.807	11,46	1.342.811.421	*Other current assets*
Total Aset Lancar	**21.449.868.866**		**26.012.213.597**	***Total Current Assets***
ASET TIDAK LANCAR				***NON-CURRENT ASSETS***
Investasi jangka panjang	4.496.780.394	12,46	5.012.419.887	*Long-term investment*
Properti investasi - neto	2.105.464.893	13	1.323.604.656	*Investment properties - net*
Aset tetap - neto	42.263.350.916	14	41.042.837.467	*Fixed assets - net*
Aset kerja sama operasi - neto	364.526.924	15	368.258.512	*Joint operation assets - net*
Aset hak-guna - neto	827.239.304	18	786.222.536	*Right-of-use assets - net*
Aset pajak tangguhan	2.239.828.188	24f	1.356.130.261	*Deferred tax assets*
Aset takberwujud - neto	42.897.155.187	16	43.523.228.617	*Intangible assets - net*
Aset kontrak konsesi	6.635.265.469	17	5.281.379.972	*Concession contractual assets*
Taksiran tagihan restitusi pajak	851.589.996	24a	1.142.420.387	*Estimated claims for tax refund*
Aset tidak lancar lainnya	1.923.735.582	19,44f,46	1.659.019.867	*Other non-current assets*
Total Aset Tidak Lancar	**104.604.936.853**		**101.495.522.162**	***Total Non-current Assets***
TOTAL ASET	**126.054.805.719**		**127.507.735.759**	***TOTAL ASSETS***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2025
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	Catatan/ *Notes*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
LIABILITAS DAN EKUITAS				***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS				***LIABILITIES***
LIABILITAS JANGKA PENDEK				***CURRENT LIABILITIES***
Utang usaha		20,45		*Trade payables*
Pihak ketiga	803.956.602		766.047.682	*Third parties*
Pihak berelasi	128.326.253	44g	96.565.849	*Related parties*
Liabilitas kontrak jangka pendek	1.685.524.258	21h	1.659.298.580	*Short-term contract liabilities*
Utang pajak	580.175.753	24b	500.490.093	*Taxes payable*
Beban akrual	9.414.369.377	22,46	6.666.411.251	*Accrued expenses*
Bagian lancar atas:				*Current maturities of:*
Utang obligasi	49.988.389	25,45,46	18.446.568.351	*Bonds payable*
Utang bank jangka panjang	4.294.440.048	26,45,46	1.068.675.471	*Long-term bank loans*
Liabilitas sewa	363.576.600	18,46	134.702.846	*Lease liabilities*
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	429.519.134	30	463.764.537	*Short-term employee benefit liabilities*
Liabilitas jangka pendek lainnya		23,46		*Other current liabilities*
Pihak ketiga	755.771.691		517.102.900	*Third parties*
Pihak berelasi	385.664.948	44i,44j	879.167.406	*Related parties*
Total Liabilitas Jangka Pendek	**18.891.313.053**		**31.198.794.966**	***Total Current Liabilities***
LIABILITAS JANGKA PANJANG				***NON-CURRENT LIABILITIES***
Utang obligasi	8.487.957.191	25,45,46	8.249.264.237	*Bonds payable*
Utang bank jangka panjang	34.095.339.441	26,45,46	23.447.068.879	*Long-term bank loans*
Liabilitas sewa	442.519.425	18,46	775.556.684	*Lease liabilities*
Utang lembaga keuangan non-bank		27,46		*Loan from non-bank financial institution*
Pihak ketiga	-		763.941.899	*Third parties*
Pihak berelasi	-	44k	1.502.045.095	*Related parties*
Liabilitas pajak tangguhan	84.857.757	24f	91.699.230	*Deferred tax liabilities*
Liabilitas kontrak jangka panjang	5.069.291.460	28	5.164.017.893	*Long-term contract liabilities*
Liabilitas jangka panjang lainnya	955.431.661	29,44l,45,46	820.081.369	*Other long-term liabilities*
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	7.670.491.965	30	5.308.412.758	*Long-term employee benefit liabilities*
Total Liabilitas Jangka Panjang	**56.805.888.900**		**46.122.088.044**	***Total Non-current Liabilities***
TOTAL LIABILITAS	**75.697.201.953**		**77.320.883.010**	***TOTAL LIABILITIES***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2025
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

	31 Desember 2025/ ***December 31, 2025***	**Catatan/** ***Notes***	**31 Desember 2024/** ***December 31, 2024***	
EKUITAS				***EQUITY***
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				***Equity attributable to owners of the parent entity***
Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham masing-masing untuk saham Seri A Dwiwarna dan Seri B Modal dasar - 156.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, terdiri dari 1 saham seri A Dwiwarna dan 155.999.999 saham Seri B Modal ditempatkan dan disetor penuh - 40.575.584 saham pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, terdiri dari 1 saham Seri A Dwiwarna dan 40.575.583 Seri B	40.575.584.000	31	40.575.584.000	*Share capital - par value of Rp1,000,000 (full amount for Series A Dwiwarna and Series B shares, respectively Authorized capital - 156,000,000 shares as of December 31, 2025 and 2024, consist of 1 A Series Dwiwarna and 155,999,999 Series B shares Issued and fully paid - 40,575,584 shares as of December 31, 2025 and 2024 consists of 1 Series A Dwiwarna share and 40,575,583 Series B shares*
Modal donasi	26.825.982	32	26.825.982	*Donated capital*
Tambahan modal disetor	(33.358.048.450)	33	(33.358.048.450)	*Additional paid-in capital*
Komponen ekuitas lainnya	1.466.121		1.466.121	*Other equity component*
Selisih nilai transaksi dengan pihak non-pengendali	836.905.071	34	836.905.071	*Difference in value of transactions with non-controling interest*
Saldo laba				*Retained earnings*
Ditentukan penggunaannya	38.962.857.822		37.079.792.756	*Appropriated*
Belum ditentukan penggunaannya	5.304.105.426		4.726.606.443	*Unappropriated*
Penghasilan komprehensif lain	(3.457.292.320)	36	(1.792.048.331)	*Other comprehensive income*
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk - neto	**48.892.403.652**		**48.097.083.592**	***Equity attributable to owners of the parent entity - net***
Kepentingan nonpengendali	1.465.200.114	37	2.089.769.157	*Non-controlling interests*
Ekuitas - neto	**50.357.603.766**		**50.186.852.749**	***Equity - net***
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**126.054.805.719**		**127.507.735.759**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Year Ended
December 31, 2025
(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)***

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Years Ended December 31,*			
	2025	**Catatan/ *Notes***	**2024**	
Pendapatan operasi	36.728.274.052	38	34.833.868.458	*Operating revenues*
Beban operasi	(28.588.823.619)	39	(28.356.501.274)	*Operating expenses*
Beban operasi lainnya - neto	(680.943.444)	40	(190.608.606)	*Other operating expenses - net*
LABA OPERASI	**7.458.506.989**		**6.286.758.578**	***INCOME FROM OPERATIONS***
Pendapatan keuangan	900.264.463	41	838.881.229	*Finance income*
Beban keuangan	(2.966.736.560)	42	(3.004.687.722)	*Finance costs*
Bagian laba entitas asosiasi	433.063.192	43	540.555.119	*Equity in income of associates*
LABA SEBELUM PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN BADAN	**5.825.098.084**		**4.661.507.204**	***INCOME BEFORE FINAL TAX AND CORPORATE INCOME TAX***
Beban pajak final	(730.626.924)	24d	(680.063.269)	*Final tax expense*
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BADAN	**5.094.471.160**		**3.981.443.935**	***INCOME BEFORE CORPORATE INCOME TAX***
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN BADAN				***CORPORATE INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)***
Kini	(1.144.790.711)	24e	(886.121.839)	*Current*
Tangguhan	413.625.324	24f	707.815.249	*Deferred*
LABA TAHUN BERJALAN	**4.363.305.773**		**3.803.137.345**	***INCOME FOR THE YEAR***
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				***OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				***Item that will not be reclassified to profit or loss***
Pengukuran kembali program imbalan pasti - neto	(1.690.586.691)	36	763.117.936	*Remeasurements of defined benefit plans - net off*
Perubahan nilai wajar aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	215.991.882	36	(173.841.358)	*Change in fair value of financial assets at fair value through other comprehensive income*
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				***Item that will be reclassified to profit or loss***
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	(6.614.063)	36	102.980.463	*Exchange differences due to financial statements translation*
Bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas	(184.035.117)	36	(111.286.795)	*Effective portion of gains and losses on hedging instrument in relation to cash flow hedge*
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**2.698.061.784**		**4.384.107.591**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (continued)
For the Year Ended
December 31, 2025
(Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Years Ended December 31,*			
	2025	**Catatan/ *Notes***	**2024**	
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				***INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:***
Pemilik entitas induk	4.161.329.930		3.583.830.947	*Owners of the parent entity*
Kepentingan nonpengendali	201.975.843	2c,37	219.306.398	*Non-controlling interests*
LABA TAHUN BERJALAN	**4.363.305.773**		**3.803.137.345**	***INCOME FOR THE YEAR***
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:***
Pemilik entitas induk	2.496.603.203		4.164.801.193	*Owners of the parent entity*
Kepentingan nonpengendali	201.458.581	2c,37	219.306.398	*Non-controlling interests*
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**2.698.061.784**		**4.384.107.591**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR***
LABA PER SAHAM DASAR (nilai penuh)	102.557	2w	88.325	***BASIC EARNINGS PER SHARE*** *(full amount)*
LABA PER SAHAM DILUSIAN (nilai penuh)	101.242	2w	87.192	***DILUTED EARNINGS PER SHARE*** *(full amount)*

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For the Year Ended December 31, 2025
(Expressed in Thousands of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

		Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/*Equity attributable to owners of the parent entity*														
									Penghasilan komprehensif lain/*Other comprehensive income*							
	Catatan/ *Notes*	Modal saham ditempatkan dan disetor penuh/ *Issued and fully paid share capital*	Modal donasi/ *Donated capital*	Tambahan modal disetor/ *Additonal paid-in capital*	Komponen ekuitas lainnya/ *Other equity component*	Selisih nilai transaksi dengan pihak non-pengendali/ *Difference in value of transactions with non-controlling interest*	Saldo laba/*Retained earnings*		Selisih kurs penjabaran laporan keuangan/ *Exchange difference due to financial statement translation*	Pengukuran kembali program imbalan pasti/ *Remeasurements of defined benefit plans*	Perubahan nilai wajar aset keuangan melalui penghasilan komprehensif lain/ *Changes in fair value of financial assets through other comprehensive income*	Bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas/ *Effective portion of gains and losses on hedging instument in cash flow hedge*	Neto/ *Net*	Kepentingan nonpengendali/ *Non-controlling interests*	Ekuitas - neto/ *Equity - net*	
							Ditentukan penggunaannya/ *Appropriated*	Belum ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated*								
Saldo per 31 Desember 2023		**40.575.584.000**	**26.825.982**	**(33.358.048.450)**	**1.466.121**	**836.905.071**	**34.296.140.473**	**4.964.897.779**	**472.646.801**	**(1.380.419.751)**	**41.965.053**	**(1.507.210.680)**	**44.970.752.399**	**1.870.462.759**	**46.841.215.158**	***Balance as of December 31, 2023***
Pembagian dividen kas	35	-	-	-	-	-	-	(1.038.470.000)	-	-	-	-	(1.038.470.000)	-	(1.038.470.000)	*Distribution of cash dividend*
Cadangan umum	35	-	-	-	-	-	2.783.652.283	(2.783.652.283)	-	-	-	-	-	-	-	*General reserve*
Penghasilan komprehensif lain	36	-	-	-	-	-	-	-	102.980.463	763.117.936	(173.841.358)	(111.286.795)	580.970.246	-	580.970.246	*Other comprehensive income*
Laba tahun berjalan		-	-	-	-	-	-	3.583.830.947	-	-	-	-	3.583.830.947	219.306.398	3.803.137.345	*Income for the year*
Saldo per 31 Desember 2024		**40.575.584.000**	**26.825.982**	**(33.358.048.450)**	**1.466.121**	**836.905.071**	**37.079.792.756**	**4.726.606.443**	**575.627.264**	**(617.301.815)**	**(131.876.305)**	**(1.618.497.475)**	**48.097.083.592**	**2.089.769.157**	**50.186.852.749**	***Balance as of December 31, 2024***
Pembagian dividen kas	35	-	-	-	-	-	-	(1.700.765.881)	-	-	-	-	(1.700.765.881)	(87.757.387)	(1.788.523.268)	*Distribution of cash dividend*
Cadangan umum	35	-	-	-	-	-	1.883.065.066	(1.883.065.066)	-	-	-	-	-	-	-	*General reserve*
Selisih nilai transaksi entitas non-pengendali		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(738.270.237)	(738.270.237)	*Difference in value of transactions with non-controlling interest*
Penghasilan komprehensif lain	36	-	-	-	-	-	-	-	(6.614.063)	(1.690.586.691)	215.991.882	(184.035.117)	(1.665.243.989)	(517.262)	(1.665.761.251)	*Other comprehensive income*
Laba tahun berjalan		-	-	-	-	-	-	4.161.329.930	-	-	-	-	4.161.329.930	201.975.843	4.363.305.773	*Income for the year*
Saldo per 31 Desember 2025		**40.575.584.000**	**26.825.982**	**(33.358.048.450)**	**1.466.121**	**836.905.071**	**38.962.857.822**	**5.304.105.426**	**569.013.201**	**(2.307.888.506)**	**84.115.577**	**(1.802.532.592)**	**48.892.403.652**	**1.465.200.114**	**50.357.603.766**	***Balance as of December 31, 2025***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS
OF CASH FLOWS
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Years Ended December 31,*			
	2025	**Catatan/ *Notes***	**2024**	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan kas dari pelanggan	35.488.258.130		35.081.096.090	*Cash receipts from customers*
Penerimaan pendapatan bunga	158.955.682		138.307.745	*Receipt of interest income*
Pembayaran kepada kontraktor, pemasok dan lainnya	(21.090.934.600)		(14.689.152.169)	*Payment to contractors, suppliers and others*
Pembayaran kepada karyawan	(5.605.354.721)		(7.407.666.379)	*Payment to employees*
Pembayaran pajak penghasilan	(1.276.784.824)		(1.210.529.494)	*Payment for income taxes*
Penerimaan (pembayaran) pajak	486.432.713		288.092.252	*Tax receipt (payment)*
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi	**8.160.572.380**		**12.200.148.045**	***Net Cash Provided by Operating Activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Pengembalian modal dari entitas asosiasi	52.920.000	12a	-	*Refund of capital from associates*
Pencairan investasi jangka pendek	852.989.150		4.074.963.760	*Withdrawal of short-term investments*
Penerimaan dividen dari entitas asosiasi	185.531.783	12	181.804.647	*Receipt of dividend from associates*
Hasil penjualan aset tetap	27.790.798	14	11.889.146	*Proceed on sales of fixed assets*
Perolehan aset tetap, properti investasi dan aset takberwujud	(2.624.617.264)		(5.140.358.970)	*Acquisition of fixed assets, investment properties and intangible assets*
Penempatan kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya	(1.424.986.903)		(1.268.054.099)	*Placement of restricted cash and cash equivalents*
Pembayaran uang muka aset tetap	(351.554.124)	19,52	(27.848.535)	*Payment of advances for fixed assets*
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi	**(3.281.926.560)**		**(2.167.604.051)**	***Net Cash Used in Investing Activities***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2025
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS
OF CASH FLOWS (continued)
As of December 31, 2025
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Years Ended December 31,*			
	2025	**Catatan/ *Notes***	**2024**	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penerimaan pinjaman	22.633.108.904	52	9.928.858.552	*Receipt of loans*
Pembayaran pinjaman bank dan utang obligasi	(27.164.733.851)	52	(8.089.799.531)	*Payment of bank loans and bonds payable*
Pembayaran bunga	(2.758.777.627)		(2.991.656.809)	*Interest payment*
Pembayaran dividen	(1.788.523.268)	52	(1.152.575.231)	*Payment of dividend*
Pembayaran liabilitas sewa	(585.313.070)	18,52	(185.720.560)	*Payments of lease liabilities*
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	**(9.664.238.912)**		**(2.490.893.579)**	***Net Cash Used in Financing Activities***
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	**(4.785.593.091)**		**7.541.650.415**	***NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
Dampak perubahan selisih kurs terhadap kas dan setara kas	41.849		320.019.281	*Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents*
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	**20.352.943.946**	4	**12.491.274.250**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE YEAR***
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**15.567.392.704**	4	**20.352.943.946**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF YEAR***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia (dahulu "Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II" atau "Pelindo II") ("Perusahaan" atau "PT Pelabuhan Indonesia (Persero)") pada awalnya didirikan sebagai Perusahaan Umum ("Perum") Pelabuhan II berdasarkan Peraturan Pemerintah ("PP") No. 15 Tahun 1983 juncto PP No. 5 Tahun 1985. Perum Pelabuhan II merupakan Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") yang berada di bawah pembinaan Departemen Perhubungan Republik Indonesia.

Berdasarkan PP No. 57 Tahun 1991, Perum Pelabuhan II mengalami pengalihan bentuk menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Sebagai tindak lanjut PP tersebut, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) didirikan berdasarkan Akta Notaris Imas Fatimah, S.H., No. 3 tanggal 1 Desember 1992. Akta pendirian ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-4754.HT.01.01. TH.93 tanggal 17 Juni 1993. Sejak terbentuknya Kementerian BUMN pada tahun 1998, Perusahaan berada di bawah pembinaan Kementerian BUMN. Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Akta No.2 Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., tanggal 9 Februari 2022 tentang perubahan struktur permodalan dan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui suratnya No. AHU-0014773.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 1 Maret 2022.

Berdasarkan Akta No. 09 tanggal 21 Agustus 2019, Pemerintah Negara Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri BUMN melakukan perubahan jenis saham yang semula tanpa seri menjadi terdiri dari saham Seri A Dwiwarna dan saham Seri B.

1. GENERAL

a. Establishment and General Information

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia (formerly "Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II" or "Pelindo II") ("the Company" or "PT Pelabuhan Indonesia (Persero)") was initially established as Perusahaan Umum ("Perum") Pelabuhan II based on Government Regulation No. 15 of 1983 as amended by Government Regulation No. 5 of 1985. Perum Pelabuhan II was a State-Owned Enterprise ("SOE") under the supervision of the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia.

Based on PP No. 57 of 1991, Perum Pelabuhan II underwent a transfer of form to become a Limited Liability Company (Persero). As a follow-up to the PP, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) was established based on Deed of Notary Imas Fatimah, S.H., No. 3 dated December 1, 1992. This establishment deed was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia by Decree No. C2-4754.HT.01.01. TH.93 dated June 17, 1993. Since the formation of the Ministry of SOE in 1998, the Company has been under the guidance of the Ministry of SOE. The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently based on Notarial Deed No.2 of Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., dated February 9, 2022 regarding changes in capital structure and changes to the Articles of Association of the Company. The Deed has been approved by the Ministry of Law and Human Rights through its letter No. AHU-0014773.AH.01.02 Tahun 2022 dated March 1, 2022.

Based on the Notarial Deed No. 09 dated August 21, 2019, the Government of the Republic of Indonesia which in this case represented by the Minister of SOE to changes the type of shares which originally without series, changed to be consisted of Series A Dwiwarna shares and Series B shares.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan Informasi Umum (lanjutan)

Maksud dan tujuan Perusahaan adalah melakukan kegiatan pengusahaan di Pelabuhan berupa penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan dan jasa terkait dengan kepelabuhanan dan mendukung ekosistem maritim, optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Selain lingkup usaha tersebut di atas, Perusahaan dapat pula mendirikan dan menjalankan usaha lain yang memiliki hubungan dengan usaha kepelabuhanan.

Saat ini, Perusahaan dan entitas anaknya (selanjutnya disebut "Grup") bergerak dalam beberapa bidang usaha yang meliputi jasa kepelabuhanan, logistik, jasa informasi teknologi, jasa pengerukan, jasa kepelatihanan dan lainnya.

Kantor pusat Perusahaan berlokasi di Gedung Pelindo Tower Jl. Yos Sudarso No. 9 Rawa Badak Utara, Koja, Jakarta 14230, Indonesia.

Entitas induk dan entitas induk terakhir Perusahaan adalah Pemerintah Republik Indonesia.

Pada tanggal 1 Oktober 2021, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I ("Pelindo I"), Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III ("Pelindo III") dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV ("Pelindo IV") melakukan penggabungan ke dalam Perusahaan, dengan Perusahaan sebagai perusahaan hasil penggabungan (Catatan 1f).

1. GENERAL (continued)

a. Establishment and General Information (continued)

The Company's purpose and objectives are to carry out business activities at the Port in the form of providing and/or providing port services and services related to ports and supporting the maritime ecosystem, optimizing the use of resources owned by the Company to produce high quality and highly competitive goods and services to obtain/pursue profits in order to increase the value of the Company by implementing the principles of a Limited Liability Company.

Other than the above-mentioned scope of activities, the Company may establish and manage other businesses related to port business.

Currently, the Company and its subsidiaries (hereafter collectively referred as "the Group") are involved in several businesses consisting of port services, logistic, information technology services, dredging services, training services and others.

The Company's head office is located at Gedung Pelindo Tower Jl. Yos Sudarso No. 9 Rawa Badak Utara, Koja, Jakarta 14230, Indonesia.

The Company's parent and ultimate parent is the Government of the Republic of Indonesia.

On October 1, 2021, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I ("Pelindo I"), Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III ("Pelindo III") and Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV ("Pelindo IV") merged to the Company, with the Company as the surviving entity (Note 1f).

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan Informasi Umum (lanjutan)

Sehubungan dengan penggabungan tersebut di atas, Perusahaan mengelola 4 (empat) Regional yang terdiri dari:

Regional 1
Untuk menjalankan kegiatan operasinya, Regional 1 memiliki 13 (tiga belas) pelabuhan cabang yang terdiri dari Belawan, Dumai, Tanjung Pinang, Pekanbaru, Tanjung Balai Karimun, Tembilahan, Gunung Sitoli, Sibolga, Tanjung Balai Asahan, Kuala Tanjung, Malahayati, Lhokseumawe, dan Batam.

Regional 2
Regional 2 mengelola 12 (dua belas) Cabang Pelabuhan yang terdiri dari Tanjung Priok, Banten, Panjang, Teluk Bayur, Pontianak, Palembang, Bengkulu, Jambi, Cirebon, Pangkal Balam, Sunda Kelapa dan Tanjung Pandan.

Regional 3
Regional 3 mengelola 3 (tiga) kantor sub-regional yang meliputi 22 (dua puluh dua) Terminal Pelabuhan (Cabang) yang terdiri dari:

Sub-regional	Cabang/*Branch*
Jawa	Gresik, Tanjung Emas, Tanjung Intan, Tanjung Wangi, Tanjung Perak, dan/*and* Kalimas
Bali Nusra	Benoa, Bima, Celukan Bawang, Maumere, Waingapu, Kalabahi, Ende-IPPI, Labuan Bajo, Badas, Lembar, dan/*and* Tenau Kupang
Kalimantan	Kotabaru, Batulicin, Bagendang, Bumiharjo, dan/*and* Trisakti

Regional 4
Regional 4 mengelola 22 (dua puluh dua) cabang yang terdiri dari Makassar, Balikpapan, Samarinda, Bitung, Sorong, Ambon, Jayapura, Tarakan, Pantoloan, Kendari, Bontang Lhoktuan, Nunukan, Biak, Manokwari, Tanjung Redeb, Gorontalo, Tolitoli, Fakfak, Manado, Pare-pare, Ternate, dan Merauke.

1. GENERAL (continued)

a. Establishment and General Information (continued)

In relation to the merger as mentioned above, the Company manages 4 (four) Regions as follows:

Region 1
In providing its services, Region 1 has 13 (thirteen) port branches as follows Belawan, Dumai, Tanjung Pinang, Pekanbaru, Tanjung Balai Karimun, Tembilahan, Gunung Sitoli, Sibolga, Tanjung Balai Asahan, Kuala Tanjung, Malahayati, Lhokseumawe, and Batam.

Region 2
Region 2 manages 12 (twelve) Port Branches as follows Tanjung Priok, Banten, Panjang, Teluk Bayur, Pontianak, Palembang, Bengkulu, Jambi, Cirebon, Pangkal Balam, Sunda Kelapa and Tanjung Pandan.

Region 3
Region 3 manages 3 (three) sub-regional offices which includes 22 (twenty two) Port Terminals (Branches) as follows:

Sub-region	Cabang/*Branch*
Java	Gresik, Tanjung Emas, Tanjung Intan, Tanjung Wangi, Tanjung Perak, dan/*and* Kalimas
Bali Nusra	Benoa, Bima, Celukan Bawang, Maumere, Waingapu, Kalabahi, Ende-IPPI, Labuan Bajo, Badas, Lembar, dan/*and* Tenau Kupang
Kalimantan	Kotabaru, Batulicin, Bagendang, Bumiharjo, dan/*and* Trisakti

Region 4
Region 4 manages 22 (twenty two) branches as follows Makassar, Balikpapan, Samarinda, Bitung, Sorong, Ambon, Jayapura, Tarakan, Pantoloan, Kendari, Bontang Lhoktuan, Nunukan, Biak, Manokwari, Tanjung Redeb, Gorontalo, Tolitoli, Fakfak, Manado, Pare-pare, Ternate, and Merauke.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan Informasi Umum (lanjutan)

Berikut adalah ketentuan kepelabuhanan dan perizinan signifikan sehubungan dengan operasional pelabuhan:

a. Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran tanggal 7 Mei 2008.
b. Undang-Undang No.66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Pelayaran.
c. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, tanggal 20 Oktober 2009, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2015.
d. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran.
e. Surat Menteri Perhubungan No. HK.003/1/11. Phb 2011 tanggal 6 Mei 2011 perihal Pelaksanaan Ketentuan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran terhadap PT Pelabuhan Indonesia I, II, II dan IV (Persero).
f. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan.
g. Peraturan Menteri Perhubungan No. 72 Tahun 2017 tentang Jenis, Struktur, Golongan, dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. 121 Tahun 2018.
h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2021 tentang Konsesi dan Kerja Sama Bentuk Lainnya antara Penyelenggara Pelabuhan dengan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhanan.

1. GENERAL (continued)

a. Establishment and General Information (continued)

The following are significant port regulations and permits in relation to port operations:

a. Act No. 17 Tahun 2008 regarding Shipping dated May 7, 2008.
b. Act No. 66 Tahun 2024 concerning the Third Amendment to the Shipping Law.
c. Government Regulation No. 61 Tahun 2009 regarding Port dated October 20, 2009, as amended by Government Regulation No. 64 Tahun 2015.
d. Government Regulation No. 31 of 2021 concerning the Implementation of the Shipping Sector.
e. Minister of Transportation's Letter No. HK.003/1/11. Phb 2011 dated May 6, 2011 regarding the application of Act No. 17 Tahun 2008 for Shipping Affairs for PT Pelabuhan Indonesia I, II, III and IV (Persero).
f. Government Regulation No. 15 Tahun 2016 regarding Type and Tariff on Non-Tax Revenues types that apply to the Ministry of Transportation.
g. Regulation of the Minister of Transportation No. 72 Tahun 2017 on Types, Structures, Classes, and Mechanisms for Determining Port Services Rates as amended by the Regulation of the Minister of Transportation No. 121 Tahun 2018.
h. Regulation of the Minister of Transportation Number 48 of 2021 concerning Concessions and Other Forms of Cooperation between Port Operators and Port Business Entities in the Port Sector.

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan Informasi Umum (lanjutan)

Berikut adalah ketentuan kepelabuhanan dan perizinan signifikan sehubungan dengan operasional pelabuhan: (lanjutan)

i. Peraturan Menteri Perhubungan No. 50 Tahun 2021 tentang tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut.
j. Peraturan Menteri Perhubungan No. 15 Tahun 2015 tentang Konsesi dan Bentuk Kerja Sama Lainnya antara Pemerintah dengan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. 166 Tahun 2015, telah dicabut dan diganti oleh Peraturan Menteri Perhubungan No. 48 Tahun 2021 tentang Konsesi dan Kerja Sama Bentuk Lainnya antara Penyelenggara Pelabuhan dengan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhanan
k. Peraturan Menteri Perhubungan No. 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan No. 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut telah dicabut dan diganti oleh Peraturan Menteri No. 50 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut.
l. Peraturan Menteri Perhubungan No. 77 Tahun 2016 Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
m. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No.KP 133 Tahun 2011 tanggal 2 Maret 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Kepada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Sebagai Badan Usaha Pelabuhan (“BUP”).

1. GENERAL (continued)

a. Establishment and General Information (continued)

The following are significant port regulations and permits in relation to port operations: (continued)

i. Minister of Transportation Regulation No. 50 of 2021 concerning the Operation of Sea Ports.
j. Regulation of the Minister of Transportation No. 15 Tahun 2015 on Concessions and Other Forms of Cooperation between the Government and Business Entity Ports Sector as amended by the Regulation of the Minister of Transportation No. 166 Tahun 2015, has been revoked and replaced by Regulation of the Minister of Transportation No. 48 Tahun 2021 on Concessions and Other Forms of Cooperation between Port Administrators and Port Business Entities.
k. Regulation of the Minister of Transporation No. 57 Tahun 2020 concerning the Second Amendment to the Regulation of the Minister of Transportation No. 51 Tahun 2015 concerning the Operation of Seaports, has been revoked and replaced by Regulation of the Minister of Transportation No. 50 Tahun 2021 concerning the Operation of Seaports.
l. Regulation of the Minister of Transportation No. 77 Tahun 2016 on Implementation Guidelines Type and Tariff for Non Tax Revenue that apply At the Directorate General of Sea Transportation.
m. Decree of the Minister of Transportation of Republic Indonesia No.KP 133 Tahun 2011 dated March 2, 2011 regarding issuance of business permit to PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) as a Port Operation Entity (“BUP”).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan Informasi Umum (lanjutan)

Berikut adalah ketentuan kepelabuhanan dan perizinan signifikan sehubungan dengan operasional pelabuhan: (lanjutan)

n. Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 936 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Usaha kepada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sebagai BUP.
o. Keputusan Dirjen Perhubungan Laut No.KP.1073/DJPL/2021 tentang Pelimpahan kepada Badan Usaha Pelabuhan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) untuk melaksanakan Pelayanan Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal.
p. Keputusan Dirjen Perhubungan Laut No.KP-DJPL 478 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Dirjen Perhubungan Laut No.KP.1073/DJPL/2021 tentang Pelimpahan kepada Badan Usaha Pelabuhan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) untuk melaksanakan Pelayanan Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal.
q. Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelolaan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat 1 peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (“NIB”) kepada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang ditetapkan tanggal 25 September 2018.
r. Perjanjian konsesi (Catatan 48).

1. GENERAL (continued)

a. Establishment and General Information (continued)

The following are significant port regulations and permits in relation to port operations: (continued)

n. Decision of Minister of Transportation No. KP 936 Tahun 2012 regarding the Granting of Operation Permit to PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) as BUP.
o. Decree of the Director General of Sea Transportation No. KP.1073/DJPL/2021 concerning the Delegation to the Port Business Entity PT Pelabuhan Indonesia (Persero) to carry out Ship Guidance and Towing Services.
p. Decree of the Director General of Sea Transportation No. KP-DJPL 478 of 2022 concerning Amendments to the Decree of the Director General of Sea Transportation No. KP.1073/DJPL/2021 concerning Delegation to the Port Business Entity PT Pelabuhan Indonesia (Persero) to carry out Ship Pilotage and Towing Services.
q. The Government of the Republic of Indonesia c.q OSS Organizing Management Institution based on the provisions of Article 24 paragraph 1 of government regulation number 24 year 2018 concerning electronic integrated business licensing services (“NIB”) to PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) which are set on September 25, 2018.
r. Concession agreement (Note 48).

1. UMUM (lanjutan)

b. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Sekretaris Perusahaan dan Karyawan

Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN dan PT Danantara Asset Management (Persero) ("DAM") No SK-264/MBU/09/2025, No. SK.059/DI-DAM/DO/2025 dan No. SK-265/MBU/09/2025, No.SK.060/DI-DAM/DO/2025 tanggal 23 September 2025, yang dinyatakan dalam Akta Notaris Nanda Fauz Iwan,S.H.,M.Kn No. 10 dan 11, Menteri BUMN dan Direktur Utama DAM selaku Para Pemegang Saham Perusahaan diantaranya menetapkan perubahan nomenklatur serta susunan Dewan Komisaris dan Direksi menjadi sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

b. Board of Commissioners, Directors, Audit Committee, Corporate Secretary and Employees

Board of Commissioners and Directors

Based on the Decree of the Minister of SOEs and PT Danantara Asset Management ("DAM") No SK-264/MBU/09/2025, No. SK.059/DIDAM/DO/2025 and No. SK-265/MBU/09/2025, No. SK.060/DI-DAM/DO/2025 dated September 23, 2025, as stated in the Notarial Deed of Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn, No. 10 and 11, the Minister of SOEs and the President Director of DAM, in their capacity as the Shareholders of the Company, have determined amendments to the nomenclature and the Board of Commissioners and Board of Directors as follows:

31 Desember 2025		***December 31, 2025***
Dewan Komisaris		***Board of Commissioners***
Komisaris Utama/ Independen	Agus Suhartono	*President/Independent Commisioner*
Wakil Komisaris Utama	Suntana	*Vice President Commisioner*
Komisaris Independen	Maximianus Puguh Djiwanto	*Independent Commissioner*
Komisaris	Jodi Mahardi	*Commissioner*
Komisaris	Arief Poyuono	*Commissioner*
Komisaris	Elwi Danil	*Commissioner*
Komisaris Independen	Ilhamsyah	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Rakhman Fuadhy Kurniawan	*Independent Commissioner*
Direksi		***Directors***
Direktur Utama	Arif Suhartono	*President Director*
Direktur Keuangan	Bachtiar Soeria Atmadja	*Finance Director*
Direktur Teknik	Muhammad Suriawan Wakan	*Technical Director*
Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum	Dwi Fatan Lilyana	*Director of Human Resources and General Affair*
Direktur Komersial	Drajat Sulistyo	*Commercial Director*
Direktur Manajemen Risiko	Boy Robyanto	*Risk Management Director*
Direktur Operasi	Putut Sri Muljanto	*Operations Director*
Plt Direktur Pengembangan Usaha	Putut Sri Muljanto	*Acting Business Development Director*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

1. UMUM (lanjutan)

b. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Sekretaris Perusahaan dan Karyawan (lanjutan)

Dewan Komisaris dan Direksi (lanjutan)

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No.SK-308/MBU/12/2024 tanggal 17 Desember 2024, yang dinyatakan dalam Akta Notaris Nanda Fauz Iwan,S.H.,M.Kn No.15 tanggal 20 Desember 2024, Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan diantaranya menetapkan perubahan nomenklatur serta susunan Dewan Komisaris dan Direksi menjadi sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

b. Board of Commissioners, Directors, Audit Committee, Corporate Secretary and Employees (continued)

Board of Commissioners and Directors (continued)

Based on The Decree of The Minister of SOEs No.SK-308/MBU/12/2024 dated December 17, 2024 which stated on Notarial Deed Nanda Fauz Iwan, S.H.,M.Kn No.15 dated December 20, 2024 the Minister of SOEs as the General Meeting of Shareholders (GMS) of the Company stipulated among other changes of nomenclature and the Board of Commisioners and Directors as folllows:

31 Desember 2024		***December 31, 2024***
Dewan Komisaris		***Board of Commissioners***
Komisaris Utama/ Independen	Agus Suhartono	*President/Independent Commisioner*
Wakil Komisaris Utama	Suntana	*Vice President Commisioner*
Komisaris	Jodi Mahardi	*Commissioner*
Komisaris	Andus Winarno	*Commissioner*
Komisaris	Elwi Danil	*Commissioner*
Komisaris Independen	Heru Sukanto	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Rakhman Fuadhy Kurniawan	*Independent Commissioner*
Direksi		***Directors***
Direktur Utama	Arif Suhartono	*President Director*
Wakil Direktur Utama	Hambra	*Vice President Director*
Direktur Keuangan	Mega Satria	*Director of Finance*
Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum	Ihsanuddin Usman	*Director of Human Resources and General Affair*
Direktur Strategi	Prasetyo	*Strategy Director*
Direktur Investasi	Boy Robyanto	*Investment Director*
Direktur Pengelola	Putut Sri Muljanto	*Managing Director*

Komite Audit dan Sekretaris Perusahaan

Susunan Komite Audit dan Sekretaris Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Audit Committee and Corporate Secretary

The Company's Audit Committee and Corporate Secretary as of December 31, 2025 are as follows:

Komite Audit		***Audit Committee***
Ketua	Maximianus Puguh Djiwanto	*Head*
Wakil Ketua	Rakhman Fuadhy Kurniawan	*Deputy Head*
Anggota	Ahmad Zakie Mubarrok	*Member*
Anggota	Sofia Chairunnisa	*Member*
Sekretaris Perusahaan	Ali Sodikin	***Corporate Secretary***

1. UMUM (lanjutan)

b. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Sekretaris Perusahaan dan Karyawan (lanjutan)

Komite Audit dan Sekretaris Perusahaan (lanjutan)

Susunan Komite Audit dan Sekretaris Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Komite Audit		***Audit Committee***
Ketua	Heru Sukanto	*Head*
Wakil Ketua	Rakhman Fuadhy Kurniawan	*Deputy Head*
Anggota	Ahmad Zakie Mubarrok	*Member*
Anggota	Sofia Chairunnisa	*Member*
Sekretaris Perusahaan	Ardhy Wahyu Basuki	***Corporate Secretary***

Karyawan

Total karyawan tetap Grup pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebanyak 8.877 dan 9.183 karyawan (tidak diaudit).

c. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Perusahaan memiliki entitas anak, entitas asosiasi dan operasi bersama dengan persentase kepemilikan efektif sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

b. Board of Commissioners, Directors, Audit Committee, Corporate Secretary and Employees (continued)

Audit Committee and Corporate Secretary (continued)

The Company's Audit Committee and Corporate Secretary as of December 31, 2024 are as follows:

Employees

Total permanent employees of the Group as of December 31, 2025 and 2024 are 8,877 and 9,183 employees, respectively (unaudited).

c. Subsidiaries, Associates and Joint Operation Entities

As of December 31, 2025 and 2024, the Company has subsidiaries, associates and joint operation entities with effective percentage of ownership as follows:

Nama Perusahaan/ *Company name*	Tempat kedudukan/ *Domicile*	Kegiatan usaha/ *Nature of business activities*	% Kepemilikan/% *Ownership* 31 Des/ *Dec 31, 2025*	% Kepemilikan/% *Ownership* 31 Des/ *Dec 31, 2024*	Tahun pendirian/ *Year of establishment*	Total aset sebelum eliminasi/ *Total assets before elimination* 31 Des/ *Dec 31, 2025*	Total aset sebelum eliminasi/ *Total assets before elimination* 31 Des/ *Dec 31, 2024*
Kepemilikan langsung/ *Direct ownership*							
PT PelindoTerminal Petikemas ("SPTP")	Surabaya	Layanan terminal petikemas/ *Container port services*	99,99%	99,99%	2013	23.850.473.423	22.153.187.779
PT Pelindo Jasa Maritim ("SPJM")	Makassar	Penyelenggaraan dan pengusahaan jasa maritim/*Provision and operation of maritime services*	99,99%	99,99%	2021	7.587.252.815	7.053.613.356
PT Pelindo Multi Terminal ("SPMT")	Medan	Pelayanan jasa terminal non-petikemas/ *Non-container terminal services*	99,98%	99,98%	2021	4.461.381.753	4.051.659.815
PT Pelindo Solusi Logistik ("SPSL")	Jakarta	Jasa logistik/*Logistic services*	99,98%	99,98%	2021	19.098.879.065	19.523.052.158
PT Prima Husada Cipta Medan ("PHCM")	Medan	Layanan jasa kesehatan/*Health care services*	99,69%	99,69%	2016	62.058.650	61.284.669
PT Electronic Data Interchange Indonesia ("EDII")	Jakarta	Sistem informasi/*Information system*	51,00%	51,00%	1995	35.368.284	39.815.414
PT Pelabuhan Indonesia Investama ("PII") [xix]	Jakarta	Investasi pasar modal dan konsultan bisnis/*Investment in stock exchange and business consultant*	100,00%	99,00%	2017	1.191.792.072	1.094.410.841
PT Integrasi Logistik Cipta Solusi ("ILCS")	Jakarta	Sistem informasi/*Information system*	99,00%	99,00%	2012	778.225.054	548.832.416
PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia ("PMLI") [xii]	Jakarta	Jasa pelatihan dan pendidikan maritim dan logistik/*Maritime and logistic education services*	99,74%	99,74%	2013	614.457.056	557.880.866

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

1. UMUM (lanjutan)

c. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Perusahaan memiliki entitas anak, entitas asosiasi dan operasi bersama dengan persentase kepemilikan efektif sebagai berikut: (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

c. Subsidiaries, Associates and Joint Operation Entities (continued)

As of December 31, 2025 and 2024, the Company has subsidiaries, associates and joint operation entities with effective percentage of ownership as follows: (continued)

Nama Perusahaan/ *Company name*	Tempat kedudukan/ *Domicile*	Kegiatan usaha/ *Nature of business activities*	% Kepemilikan/% *Ownership* 31 Des/ *Dec 31, 2025*	% Kepemilikan/% *Ownership* 31 Des/ *Dec 31, 2024*	Tahun pendirian/ *Year of establishment*	Total aset sebelum eliminasi/ *Total assets before elimination* 31 Des/ *Dec 31, 2025*	Total aset sebelum eliminasi/ *Total assets before elimination* 31 Des/ *Dec 31, 2024*
Kepemilikan Tidak Langsung/*Indirect Ownership*							
Dimiliki melalui/*Owned through* SPTP							
PT IPC Terminal Petikemas ("IPC TPK")	Jakarta	Terminal petikemas dan konvensional/ *Container and multicargo terminal*	99,00%	99,00%	2013	1.889.084.644	1.815.139.963
PT Prima Terminal Petikemas ("PTP1")	Medan	Layanan terminal petikemas/ *Container port services*	99,70%	99,70%	2013	3.715.358.635	3.558.377.660
PT Terminal Teluk Lamong ("TTL")	Surabaya	Layanan terminal petikemas dan curah kering/*Container And dry bulk port services*	99,50%	99,50%	2013	1.395.522.420	939.952.031
PT Terminal Petikemas Surabaya ("TPS")	Surabaya	Layanan terminal petikemas/ *Container port services*	99,50%	99,50%	1999	2.370.926.609	2.906.957.306
PT Berlian Jasa Terminal Indonesia ("BJTI")	Surabaya	Layanan terminal petikemas/ *Container port services*	96,84%	96,84%	2002	5.190.709.057	5.218.265.941
PT Kaltim Kariangau Terminal ("KKT")	Balikpapan	Layanan terminal petikemas/ *Container port service*	50,00%	50,00%	2012	147.736.938	185.160.499
PT Prima Multi Terminal ("PMT") [vii]	Medan	Terminal petikemas dan konvensional/ *Container and multicargo terminal*	97,73%	97,73%	2014	3.790.297.841	3.968.735.769
Dimiliki melalui/*Owned through* SPJM							
PT Pelindo Solusi Maritim ("PSM") yang sebelumnya bernama/*previously known as* PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia ("JPPI")	Jakarta	Jasa peralatan pelabuhan/*Port equipment services*	99,71%	99,00%	2012	303.452.211	248.545.456
PT Jasa Armada Indonesia Tbk ("JAI") [ii]	Jakarta	Penyedia jasa transportasi laut/ *Ship transportation services provider*	76,89%	76,89%	2013	1.714.765.685	1.649.981.017
PT Energi Pelabuhan Indonesia ("EPI")	Jakarta	Penyedia energi listrik dan air bersih/ *Electricity provider and treated water*	55,00%	55,00%	2012	260.659.039	243.544.059
PT Pengerukan Indonesia ("Rukindo")	Jakarta	Pengerukan alur/*Dredging*	99,98%	99,91%	1991	192.746.635	236.288.271
PT Pelindo Marine Service ("PMS")	Surabaya	Layanan jasa kapal/*Shipping services*	98,23%	98,23%	2011	2.731.662.983	2.884.671.415
PT Equiport Inti Indonesia ("EII") [xvii]	Makassar	Jasa pemeliharaan/*Maintenance services*	-	99,29%	2012	-	93.841.162
PT Berkah Industri Mesin Angkat ("BIMA") [x, xvii]	Surabaya	Jasa pemeliharaan dan perbaikan peralatan pelabuhan/ *Port equipment equipment maintenance and repair service*	92,14%	90,00%	2015	998.594.476	656.084.080
PT Lamong Energi Indonesia ("LEGI") [xi]	Surabaya	Penyediaan energi/*Energy provider*	99,00%	99,00%	2014	539.661.115	463.999.128
PT Intan Sejahtera Utama ("ISMA") [xiv]	Makassar	Penyediaan jasa ketenagakerjaan/ *Employment services provider*	99,60%	99,60%	2019	35.250.923	32.875.250
PT Terminal Curah Utama ("TCU")	Semarang	Jasa pelayanan curah cair dan gas/*Liquid bulk and gas services*	51,00%	51,00%	2015	20.858.794	16.420.307

1. UMUM (lanjutan)

c. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Perusahaan memiliki entitas anak, entitas asosiasi dan operasi bersama dengan persentase kepemilikan efektif sebagai berikut: (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

c. Subsidiaries, Associates and Joint Operation Entities (continued)

As of December 31, 2025 and 2024, the Company has subsidiaries, associates and joint operation entities with effective percentage of ownership as follows: (continued)

Nama Perusahaan/ *Company name*	Tempat kedudukan/ *Domicile*	Kegiatan usaha/ *Nature of business activities*	% Kepemilikan/% *Ownership* 31 Des/ *Dec 31, 2025*	% Kepemilikan/% *Ownership* 31 Des/ *Dec 31, 2024*	Tahun pendirian/ *Year of establishment*	Total aset sebelum eliminasi/ *Total assets before elimination* 31 Des/ *Dec 31, 2025*	Total aset sebelum eliminasi/ *Total assets before elimination* 31 Des/ *Dec 31, 2024*
Kepemilikan Tidak Langsung/*Indirect Ownership* (lanjutan/*continued*)							
Dimiliki melalui/*Owned through* SPMT							
PT Pelabuhan Tanjung Priok ("PTPR")	Jakarta	Terminal *multipurpose*/ *Multipurpose terminal*	99,00%	99,00%	2013	994.042.272	946.206.419
PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk ("IKT") [iii]	Jakarta	Terminal kendaraan/*Car terminal*	71,28%	71,28%	2012	2.058.245.018	1.852.450.721
Dimiliki melalui/*Owned through* SPSL							
PT Akses Pelabuhan Indonesia ("API")[xviii]	Jakarta	Penyertaan saham pada proyek Jalan Tol/*Investment in Toll and access Road Project*	99,90%	99,79%	2014	12.867.137.883	12.746.005.785
PT Menara Maritim Indonesia ("MMI")	Jakarta	Jasa pengelola properti/*Building management service*	99,99%	99,99%	2018	1.017.546.737	976.356.693
PT Prima Pengembangan Kawasan ("PPK")	Medan	Pengembangan kawasan/*Region developer*	90,00%	90,00%	2015	916.961.067	901.110.844
PT Multi Terminal Indonesia ("MTI")[ix]	Jakarta	Jasa logistik/*Logistic services*	99,78%	99,78%	2002	1.167.104.617	861.752.078
Dimiliki melalui/*Owned through* PMLI							
PT Pelindo Daya Sejahtera ("PDS")	Surabaya	Layanan penyedia jasa tenaga kerja/ *Human resources services*	90,00%	90,00%	2008	483.359.964	422.436.804
Dimiliki melalui/*Owned through* PDS							
PT Tanjung Emas Daya Sejahtera ("TEDS")	Surabaya	Kegiatan tally/*Tally activity*	99,00%	99,00%	2014	40.781.044	33.028.770
Dimiliki melalui/*Owned through* Rukindo							
PT Pelindo Dredging Solution ("PDSi") yang sebelumnya bernama/*previously known as* PT Pelindo 3 Surabaya Terminal Peti Kemas ("P3TPK")[viii, xvi]		Jasa terminal petikemas/ *Container port services*	100,00%	100,00%	2016	8.164.889	683.569
Dimiliki melalui/*Owned through* BJTI							
PT Berlian Manyar Sejahtera ("BMS")	Surabaya	Layanan terminal/ *Port services*	60,00%	60,00%	2012	2.202.177.485	1.904.207.892
PT Pelindo Properti Indonesia ("PPI3")	Surabaya	Pengelolaan properti/ *Property management*	99,93%	99,93%	2014	258.915.345	217.681.409

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

1. UMUM (lanjutan)

c. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Perusahaan memiliki entitas anak, entitas asosiasi dan operasi bersama dengan persentase kepemilikan efektif sebagai berikut: (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

c. Subsidiaries, Associates and Joint Operation Entities (continued)

As of December 31, 2025 and 2024, the Company has subsidiaries, associates and joint operation entities with effective percentage of ownership as follows: (continued)

Nama Perusahaan/ *Company name*	Tempat kedudukan/ *Domicile*	Kegiatan usaha/ *Nature of business activities*	% Kepemilikan/% *Ownership* 31 Des/ *Dec 31, 2025*	% Kepemilikan/% *Ownership* 31 Des/ *Dec 31, 2024*	Tahun pendirian/ *Year of establishment*	Total aset sebelum eliminasi/ *Total assets before elimination* 31 Des/ *Dec 31, 2025*	Total aset sebelum eliminasi/ *Total assets before elimination* 31 Des/ *Dec 31, 2024*
Kepemilikan Tidak Langsung/*Indirect Ownership* (lanjutan/*continued*)							
Dimiliki melalui/*Owned through* PMS							
PT Alur Pelayaran Surabaya ("APBS")	Surabaya	Jasa pengerukan, reklamasi dan *Dredging, reclamation service and management of shipping channel*	93,00%	93,00%	2014	500.429.263	508.306.818
PT Pelindo Energi Logistik ("PEL")	Surabaya	Perdagangan jasa/ *Trading services*	98,90%	98,90%	2014	515.779.748	500.285.618
PT Berkah Multi Cargo ("BMC") [xviii]	Surabaya	Jasa angkutan multi moda/ *Multi-modal transportation services*	99,80%	99,80%	2015	-	59.521.060
Dimiliki melalui/*Owned through* API							
PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways ("CTP") (Catatan 1d/*Note 1d*)	Jakarta	Pengelola jalan tol/*Toll road operator*	99,998%	99,998%	2006	12.869.446.034	12.864.732.280
Dimiliki melalui/*Owned through* MTI							
PT Prima Indonesia Logistik ("PIL") [xviii, xxi]	Medan	Jasa logistik/*Logistic service*	99,73%	99,67%	2014	355.796.935	351.398.270
Entitas asosiasi/*Associate entities*							
PT Rumah Sakit Pelabuhan ("RSP") [iv]	Jakarta	Rumah sakit/*Hospital*	32,88%	32,88%	1999	445.520.000	507.542.938
PT Ambang Barito Nusapersada ("Ambapers")	Banjarmasin	Pengelolaan alur pelayanan Sungai Barito/*Management of Shipping Barito River*	40,00%	40,00%	2004	220.943.853	203.636.163
PT Jasa Marga Bali Tol ("JBT")	Bali	Pengelolaan jalan tol/ *Tollroad operator*	13,86%	13,86%	2011	1.890.367.000	1.893.224.000
PT Pelindo Husada Citra ("PHC")	Surabaya	Layanan jasa kesehatan/ *Health care services*	31,73%	31,73%	1999	467.721.434	449.695.942
PT Jakarta International Container Terminal ("JICT") (Catatan 49e/ *Note 49e)* [vi]	Jakarta	Terminal petikemas/ *Container terminal*	51,00%	51,00%	1999	15.896.616.103	15.941.616.935
Dimiliki melalui/*Owned through* PTP1 Entitas asosiasi/*Associate entities*							
PT Belawan New Container Terminal ("BNCT") [v]	Medan	Terminal petikemas/ *Container terminal*	51,00%	51,00%	2023	9.177.246.555	9.359.760.926
Dimiliki melalui/*Owned through* IPC TPK Entitas asosiasi/*Associate entities*							
PT New Priok Container Terminal One ("NPCT1") (Catatan 49c/ *Note 49c*) [i]	Jakarta	Terminal petikemas/ *Container terminal*	51,00%	51,00%	2014	4.385.666.761	4.067.699.718

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

1. UMUM (lanjutan)

c. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Perusahaan memiliki entitas anak, entitas asosiasi dan operasi bersama dengan persentase kepemilikan efektif sebagai berikut: (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

c. Subsidiaries, Associates and Joint Operation Entities (continued)

As of December 31, 2025 and 2024, the Company has subsidiaries, associates and joint operation entities with effective percentage of ownership as follows: (continued)

Nama Perusahaan/ *Company name*	Tempat kedudukan/ *Domicile*	Kegiatan usaha/ *Nature of business activities*	% Kepemilikan/% *Ownership* 31 Des/ *Dec 31, 2025*	% Kepemilikan/% *Ownership* 31 Des/ *Dec 31, 2024*	Tahun pendirian/ *Year of establishment*	Total aset sebelum eliminasi/ *Total assets before elimination* 31 Des/ *Dec 31, 2025*	Total aset sebelum eliminasi/ *Total assets before elimination* 31 Des/ *Dec 31, 2024*
Dimiliki melalui/*Owned through* BJTI Entitas asosiasi/*Associate entities*							
PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera ("BKMS")	Surabaya	Pengelolaan kawasan industri JIIPE/*JIIPE industrial estate management*	40,00%	40,00%	2012	12.556.693.645	11.671.463.308
PT Terminal Nilam Utara ("TNU")	Surabaya	Layanan terminal curah cair dan gas/*Liquid and gas bulk terminal service*	40,00%	40,00%	2013	336.602.012	373.078.996
PT Energi Manyar Sejahtera ("EMS") [xv]	Surabaya	Jasa pembangkit listrik/ *Power plant service*	30,00%	30,00%	2015	-	1.101.762
PT Prima Citra Nutrindo ("PCN") [xv]	Surabaya	Layanan jasa katering/ *Catering service*	30,00%	30,00%	2016	-	8.499.507
Dimiliki melalui/*Owned through* PEL							
PT Lamong Nusantara Gas ("LNG")	Surabaya	Pembangunan, pengelolaan dan pengoperasian Terminal LNG Jawa Timur/*Development, management and operation of LNG terminal in East Java*	49,00%	49,00%	2019	42.406.995	152.810.942
Dimiliki melalui/*Owned through* PIL Entitas asosiasi/*Associate entities*							
PT Prima Tangki Indonesia ("PTI")	Medan	Perdagangan dan pergudangan/ *Trading and warehousing*	20,00%	20,00%	2013	251.737.552	226.619.880
Operasi Bersama/*Joint Operation*							
Kerja sama Operasi Terminal Petikemas Koja ("TPK Koja") (Catatan 49d/ *Note 49d*)	Jakarta	Terminal petikemas/*Container terminal*	54,91%	54,91%	1994	7.059.116.444	6.838.854.434
Manajemen Kerja sama Operasi Maspion Terminal Kendaraan Indonesia ("MKO MTKI")	Gresik	Terminal kendaraan/*Car terminal*	45,00%	45,00%	2015	3.264.171	3.234.432

i) Laporan keuangan NPCT1 tidak dikonsolidasikan dalam laporan keuangan IPC TPK, karena IPC TPK tidak memiliki pengendalian atas NPCT1.

ii) Pada bulan Desember 2017, JAI menerbitkan saham baru sebanyak 1.215.506.500 saham atau 23% dari modal ditempatkan dan disetor JAI setelah penawaran umum perdana saham JAI di Bursa Efek Indonesia.

iii) Pada bulan Juli 2018, IKT menerbitkan saham baru sebanyak 509.147.700 saham atau 28% dari modal ditempatkan dan disetor IKT setelah penawaran umum perdana saham IKT di Bursa Efek Indonesia.

iv) Pada bulan Agustus 2020, Perusahaan melakukan penjualan saham RSP kepada PT Pertamina Bina Medika IHC ("PBM IHC") sebesar 67% sehingga kepemilikan saham Perusahaan menjadi sebesar 32,88%, dan oleh karenanya, laporan keuangan RSP tidak dikonsolidasi dalam laporan keuangan konsolidasian ini sejak pengendalian telah beralih ke PBM IHC.

i) The financial statements of NPCT1 is not consolidated into IPC TPK's financial statements, due to IPC TPK has no control over NPCT1.

ii) On December 2017, JAI issued new shares of 1,215,506,500 shares or 23% of JAI's issued and paid-up capital subsequent to the initial public offering at Indonesia Stock Exchange.

iii) On July 2018, IKT issued new shares of 509,147,700 shares or 28% of IKT's issued and paid-up capital subsequent to the initial public offering at Indonesia Stock Exchange.

iv) On August 2020, the Company sold shares of RSP to PT Pertamina Bina Medika IHC ("PBM IHC") by 67%, bringing the Company's share ownership to 32.88%, and therefore, the financial statements of RSP have not been consolidated in the consolidated financial statements since control has been transferred to PBM IHC.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

1. UMUM (lanjutan)

c. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Perusahaan memiliki entitas anak, entitas asosiasi dan operasi bersama dengan persentase kepemilikan efektif sebagai berikut: (lanjutan)

v) Laporan keuangan BNCT tidak dikonsolidasikan dalam laporan keuangan PTP1, karena PTP1 tidak memiliki pengendalian atas BNCT.

vi) Pada tanggal 30 Maret 2022, Perusahaan mengakuisisi saham JICT dari Hutchison Ports Jakarta Pte Ltd (HPJ) sebanyak 9.300.917 lembar saham sehingga kepemilikan saham JICT oleh Perusahaan menjadi sebesar 51%. Laporan keuangan JICT tidak dikonsolidasikan dalam laporan keuangan Perusahaan karena Perusahaan tidak memiliki pengendalian atas JICT.

vii) Pada tanggal 30 Januari 2023, terdapat pengalihan 97,73% saham PMT milik Pelindo kepada SPTP.

viii) Pada tanggal 18 April 2023, terdapat pengalihan 100% saham P3TPK milik TPS kepada PTPR.

ix) Pada tanggal 1 Oktober 2023, MTI menggabungkan diri dengan NTS, dimana MTI sebagai entitas yang melanjutkan kegiatan usaha.

x) Pada tanggal 1 Oktober 2023, terdapat pengalihan 90% saham BIMA milik BJTI kepada SPJM.

xi) Pada tanggal 1 November 2023, terdapat pengalihan 99% saham LEGI miliki TTL kepada SPJM.

xii) Pada tanggal 1 Februari 2024, terdapat pengalihan 90% saham PDS miliki Perusahaan kepada PMLI.

xiii) Pada tanggal 1 Februari 2024, PMLI menerbitkan 83,465 saham baru untuk Perusahaan sebagai kompensasi pengalihan saham PDS dari Perusahaan kepada PMLI.

xiv) Pada tanggal 2 Januari 2025, terdapat pengalihan 99,69% saham ISMA miliki Perusahaan kepada SPJM.

xv) Pada tanggal 16 Januari 2025, entitas asosiasi BJTI, EMS, mengalami likuidasi.

xvi) Pada tanggal 2 Mei 2025, terdapat pengalihan 100% saham PDSi yang sebelumnya bernama P3TPK miliki PTPR kepada Rukindo.

xvii) Pada tanggal 2 Juni 2025, EII menggabungkan diri dengan BIMA, dimana BIMA sebagai entitas yang melanjutkan kegiatan usaha.

xviii) Pada tanggal 26 September 2025, terdapat penambahan penyertaan modal pada API oleh SPSL sehingga kepemilikannya menjadi 99,90%.

xix) Pada tanggal 30 September 2025, Perusahaan menerima hibah dari MTI sebanyak 2.000 lembar saham atas PII atau setara dengan 1%.

1. GENERAL (continued)

c. Subsidiaries, Associates and Joint Operation Entities (continued)

As of December 31, 2025 and 2024, the Company has subsidiaries, associates and joint operation entities with effective percentage of ownership as follows: (continued)

v) The financial statement of BNCT is not consolidated in to PTP1's financial statement, due to PTP1 has no control over BNCT.

vi) On March 30, 2022, the Company acquired JICT shares from Hutchison Ports Jakarta Pte Ltd (HPJ) amounting to 9,300,917 shares, therefore, JICT shares ownership by the Company amounting to 51%. The financial statements of JICT is not consolidated into the Company's financial statements due to the Company has no control over JICT.

vii) On January 30, 2023, there was a transfer of 97.73% of PMT shares owned by Pelindo to SPTP.

viii) On April 18, 2023, there was a transfer of 100% of P3TPK shares owned by TPS to PTPR.

ix) On October 1, 2023, MTI agreed to merge with NTS, where the MTI as the surviving entity.

x) On October 1, 2023, there was a transfer of 90% of BIMA shares owned by BJTI to SPJM.

xi) On November 1, 2023, there was a transfer of 99% of LEGI shares owned by TTL to SPJM.

xii) On Feburary 1, 2024, there was a transfer of 90% of PDS shares owned by Company to PMLI.

xiii) On February 1, 2024, PMLI issued 83,465 new shares for the Company as compensation for the transfer of PDS shares from the Company to PMLI.

xiv) On January 2, 2025, there was a transfer of 99,69% of ISMA shares owned by Company to SPJM.

xv) On January 16, 2025, BJTI's associate entity, EMS, was liquidated.

xvi) On May 2, 2025, there was a transfer of 100% of PDSi previously known as P3TPK shares owned by PTPR to Rukindo.

xvii) On June 2, 2025 EII agreed to merge with BIMA, where BIMA as the surviving entity.

xviii) On September 26, 2025, there was an additional capital contribution to API by SPSL, increasing its ownership to 99.90%.

xix) On September 30, 2025, the Company received a grant from MTI of 2,000 shares of PII, equivalent to 1%.

1. UMUM (lanjutan)

c. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Perusahaan memiliki entitas anak, entitas asosiasi dan operasi bersama dengan persentase kepemilikan efektif sebagai berikut: (lanjutan)

xx) Pada tanggal 13 Oktober 2025, BJTI melepaskan kepemilikan saham atas PCN.

xxi) Pada tanggal 1 November 2025, terdapat pengalihan 99,73% saham PIL miliki SPSL kepada MTI.

d. Pengalihan Kepemilikan Saham dan Penerbitan Saham Baru

SPTP

Pada tanggal 30 Januari 2023, saham milik Perusahaan berikut dialihkan ke SPTP:

- Saham PMT sebanyak 3.244.571 lembar saham atau setara dengan 97,73% dengan nominal Rp3.244.571.000.000 (nilai penuh).

Pada tanggal 3 Januari 2022, saham-saham milik Perusahaan berikut dialihkan kepada SPTP:

- Saham BJTI sebanyak 1.079.138 lembar saham atau setara dengan 96,84% dengan nilai nominal Rp1.079.138.000.000 (nilai penuh).
- Saham TPS sebanyak 254.489.274 lembar saham atau setara dengan 99,50% dengan nilai nominal Rp127.244.637.000 (nilai penuh).
- Saham TTL sebanyak 134.325 lembar saham atau setara dengan 99,50% dengan nilai nominal Rp134.325.000.000 (nilai penuh).
- Saham PTP1 sebanyak 855.724.000 lembar saham atau setara dengan 70,00% dengan nilai nominal Rp855.724.000.000 (nilai penuh).
- Saham KKT sebanyak 125 lembar saham atau setara dengan 50,00% dengan nilai nominal Rp62.500.000 (nilai penuh).
- Saham IPC TPK sebanyak 24.750 lembar saham atau setara dengan 99,00% dengan nilai nominal Rp24.750.000.000 (nilai penuh).

1. GENERAL (continued)

c. Subsidiaries, Associates and Joint Operation Entities (continued)

As of December 31, 2025 and 2024, the Company has subsidiaries, associates and joint operation entities with effective percentage of ownership as follows: (continued)

xi) On October 13, 2025, BJTI divested its share ownership in PCN.

xxi) On November 1, 2025, there was a transfer of 99,73% of PIL shares owned by SPSL to MTI.

d. Transfer of Shares Ownership and Issuance of New Shares

SPTP

On January 30, 2023, the following share owned by the Company were transferred to SPTP:

- *PMT shares amounting to 3,244,571 shares or equivalent to 97.73% with nominal value of Rp3,244,571,000,000 (full amount).*

On January 3, 2022, the following shares owned by the Company were transferred to SPTP:

- *BJTI shares amounting to 1,079,138 shares or equivalent to 96.84% with nominal value of Rp1,079,138,000,000 (full amount).*
- *TPS shares amounting to 254,489,274 shares or equivalent to 99.50% with nominal value of Rp127,244,637,000 (full amount).*
- *TTL shares amounting to 134,325 shares or equivalent to 99.50% with nominal value of Rp134,325,000,000 (full amount).*
- *PTP1 shares amounting to 855,724,000 shares or equivalent to 70.00% with nominal value of Rp855,724,000,000 (full amount).*
- *KKT shares amounting to 125 shares or equivalent to 50.00% with nominal value of Rp62,500,000 (full amount).*
- *IPC TPK shares amounting to 24,750 shares or equivalent to 99.00% with nominal value of Rp24,750,000,000 (full amount).*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

1. UMUM (lanjutan)

d. Pengalihan Kepemilikan Saham dan Penerbitan Saham Baru (lanjutan)

SPTP (lanjutan)

Pengalihan saham tersebut telah melalui persetujuan Kementerian BUMN melalui suratnya No. S-1048/MBU/12/2021 pada tanggal 30 Desember 2021. Berdasarkan surat tersebut, nilai pengambilalihan saham selanjutnya perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan valuasi nilai wajar oleh konsultan independen.

Sehubungan dengan pengalihan hak atas saham tersebut, SPTP menerbitkan 1.079.138 saham baru, 127.244 saham baru, 134.325 saham baru, 855.724 saham baru, 62 saham baru dan 24.750 saham baru untuk Perusahaan dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham masing-masing sebagai kompensasi pengalihan saham BJTI, TPS, TTL, PTP1, KKT dan IPC TPK dari Perusahaan kepada SPTP.

Peningkatan modal dasar, penerbitan saham baru serta pengalihan saham tersebut telah diberitahukan dan disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 3 Januari 2022.

Menindaklanjuti surat Kementerian BUMN di atas, berdasarkan Akta No. 8 dari Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, tanggal 27 April 2022, SPTP melakukan penerbitan 5.041.993 lembar saham baru dengan nilai nominal Rp5.041.993.000 yang seluruhnya diambil bagian oleh Perusahaan sebagai kompensasi penyesuaian nilai wajar saham entitas anak yang dialihkan dari Perusahaan ke SPTP. Nilai wajar saham entitas anak didasarkan pada laporan KJPP Suwendho, Rinaldy dan Rekan, penilai independen, tanggal 31 Maret 2022. Akta tersebut telah diberitahunkan kepada oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui suratnya No. AHU-AH.01.03-0232830 Tahun 2022 tanggal 27 April 2022.

1. GENERAL (continued)

d. Transfer of Shares Ownership and Issuance of New Shares (continued)

SPTP (continued)

The transfer of shares has been approved by the Ministry of SOE through its letter No. S-1048/MBU/12/2021 on December 30, 2021. Based on the letter, the shares transfer value need to be followed by adjustment based on the fair value valuation by independent consultant.

In relation to such transfer of right of shares, SPTP issued 1,079,138 new shares, 127,244 new shares, 134,325 new shares, 855,724 new shares, 62 new shares and 24,750 new shares for the Company with nominal value of Rp1,000,000 (full amount) per share as compensation for the transfer of BJTI, TPS, TTL, PTP1, KKT and IPC TPK shares from the Company to SPTP, respectively.

The increase of authorized capital, the issuance of new shares and the transfers of shares has been notified to and approved by The Ministry of Law and Human Rights dated January 3, 2022.

To follow up the letter from the Ministry of SOE above, based on Deed No. 8 of Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., notary in Jakarta, dated April 27, 2022, SPTP performed issuance of 5,041,993 new shares with nominal value of Rp5,041,993,000 which taken fully by the Company as a compensation for fair value adjustment of the subsidiaries' shares that were transferred from the Company to SPTP. The fair value of subsidiaries' shares were based on KJPP Suwendho, Rinaldy dan Rekan report, an independent appraisal, dated March 31, 2022. The Deed has been notified to the Ministry of Law and Human Rights through its letter No. AHU-AH.01.03-0232830 Tahun 2022 dated April 27, 2022.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

1. UMUM (lanjutan)

d. Pengalihan Kepemilikan Saham dan Penerbitan Saham Baru (lanjutan)

SPTP (lanjutan)

Pengalihan saham tersebut di atas memenuhi kategori kombinasi bisnis antara entitas sepengendali sebagaimana diuraikan di dalam PSAK 338 tentang "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali", dengan demikian, transaksi pengalihan saham tersebut diakui menggunakan metode penyatuan kepentingan.

SPJM

Pada tanggal 3 Januari 2022, saham-saham milik Perusahaan berikut dialihkan kepada SPJM:

- Saham JAI sebanyak 4.063.504.600 lembar saham atau setara dengan 76,89% dengan nilai nominal Rp406.350.460.000 (nilai penuh).
- Saham PSM yang sebelumnya bernama JPPI sebanyak 2.475.000 lembar saham atau setara dengan 99,00% dengan nilai nominal Rp24.750.000.000 (nilai penuh).

Pada tanggal 3 Januari 2022, saham-saham milik Perusahaan berikut dialihkan kepada SPJM: (lanjutan)

- Saham EII sebanyak 28.050 lembar saham atau setara dengan 99,29% dengan nilai nominal Rp28.050.000.000 (nilai penuh).
- Saham EPI sebanyak 2.400.000 lembar saham atau setara dengan 55,00% dengan nilai nominal Rp24.000.000.000 (nilai penuh).
- Saham PMS sebanyak 305.000.000 lembar saham atau setara dengan 98,23% dengan nilai nominal Rp305.000.000.000 (nilai penuh).
- Saham Rukindo sebanyak 611.622 lembar saham atau setara dengan 99,91% dengan nilai nominal Rp611.622.000.000 (nilai penuh).

Pengalihan saham tersebut telah melalui persetujuan Kementerian BUMN melalui suratnya No. S-1050/MBU/12/2021 pada tanggal 30 Desember 2021. Berdasarkan surat tersebut, nilai pengambilalihan saham selanjutnya perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan valuasi nilai wajar oleh konsultan independen.

1. GENERAL (continued)

d. Transfer of Shares Ownership and Issuance of New Shares (continued)

SPTP (continued)

The transfers of shares meet the criteria of business combination of entities under common control as described in PSAK 338 concerning "Business Combinations of Entities Under Common Control", therefore, the transfers of shares is recognized using the pooling of interest method.

SPJM

On January 3, 2022, the following shares owned by the Company were transferred to SPJM:

- *JAI shares amounting to 4,063,504,600 shares or equivalent to 76.89% with nominal value of Rp406,350,460,000 (full amount).*
- *PSM shares previously known as JPPI amounting to 2,475,000 shares or equivalent to 99.00% with nominal value of Rp24,750,000,000 (full amount).*

On January 3, 2022, the following shares owned by the Company were transferred to SPJM: (continued)

- *EII shares amounting to 28,050 shares or equivalent to 99.29% with nominal value of Rp28,050,000,000 (full amount).*
- *EPI shares amounting to 2,400,000 shares or equivalent to 55.00% with nominal value of Rp24,000,000,000 (full amount).*
- *PMS shares amounting to 305,000,000 shares or equivalent to 98.23% with nominal value of Rp305,000,000,000 (full amount).*
- *Rukindo shares amounting to 611,622 shares or equivalent to 99.91% with nominal value of Rp611,622,000,000 (full amount).*

The transfer of shares has been approved by the Ministry of SOE through its letter No. S-1050/MBU/12/2021 on December 30, 2021. Based on the letter, the shares transfer value need to be followed by adjustment based on the fair value valuation by independent consultant.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

1. UMUM (lanjutan)

d. Pengalihan Kepemilikan Saham dan Penerbitan Saham Baru (lanjutan)

SPJM (lanjutan)

Sehubungan dengan pengalihan hak atas saham tersebut, SPJM menerbitkan 406.350 saham baru, 24.750 saham baru, 28.050 saham baru, 24.000 saham baru, 305.000 saham baru dan 611.622 saham baru untuk Perusahaan dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham masing-masing sebagai kompensasi pengalihan saham JAI, PSM yang sebelumnya bernama JPPI, EII, EPI, PMS dan Rukindo dari Perusahaan kepada SPJM.

Peningkatan modal dasar, penerbitan saham baru serta pengalihan saham tersebut telah diberitahukan dan disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 3 Januari 2022.

Menindaklanjuti surat Kementerian BUMN di atas, berdasarkan Akta No. 7 dari Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, tanggal 27 April 2022, SPJM melakukan penerbitan 1.318.372 lembar saham baru dengan nilai nominal Rp1.318.372.000 yang seluruhnya diambil bagian oleh Perusahaan sebagai kompensasi penyesuaian nilai wajar saham entitas anak yang dialihkan dari Perusahaan ke SPJM. Nilai wajar saham entitas anak didasarkan pada laporan KJPP Suwendho, Rinaldy dan Rekan, penilai independen, tanggal 31 Maret 2022. Akta tersebut telah diberitahunkan kepada oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui suratnya No. AHU-AH.01.03-0232879 tanggal 27 April 2022.

Pengalihan saham tersebut di atas memenuhi kategori kombinasi bisnis antara entitas sepengendali sebagaimana diuraikan di dalam PSAK 338 tentang “Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali”, dengan demikian, transaksi pengalihan saham tersebut diakui menggunakan metode penyatuan kepentingan.

1. GENERAL (continued)

d. Transfer of Shares Ownership and Issuance of New Shares (continued)

SPJM (continued)

In relation to such transfer of right of shares, SPJM issued 406,350 new shares, 24,750 new shares, 28,050 new shares, 24,000 new shares, 305,000 new shares and 611,622 new shares for the Company with nominal value of Rp1,000,000 (full amount) per share as compensation for the transfer of JAI, PSM previously known as JPPI, EII, EPI, PMS and Rukindo shares from the Company to SPJM, respectively.

The increase of authorized capital, the issuance of new shares and the transfers of shares has been notified to and approved by The Ministry of Law and Human Rights dated January 3, 2022.

To follow up the letter from the Ministry of SOE above, based on Deed No. 7 of Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., notary in Jakarta, dated April 27, 2022, SPJM performed issuance of 1,318,372 new shares with nominal value of Rp1,318,372,000 which taken fully by the Company as a compensation for fair value adjustment of the subsidiaries’ shares that were transferred from the Company to SPJM. The fair value of subsidiaries’ shares were based on KJPP Suwendho, Rinaldy dan Rekan report, an independent appraisal, dated March 31, 2022. The Deed has been notified to the Ministry of Law and Human Rights through its letter No. AHU-AH.01.03-0232879 dated April 27, 2022.

The transfers of shares meet the criteria of business combination of entities under common control as described in PSAK 338 concerning "Business Combinations of Entities Under Common Control", therefore, the transfers of shares is recognized using the pooling of interest method.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

1. UMUM (lanjutan)

d. Pengalihan Kepemilikan Saham dan Penerbitan Saham Baru (lanjutan)

SPJM (lanjutan)

Pada tanggal 1 Oktober 2023, saham-saham milik BJTI dialihkan kepada SPJM:

- Saham BIMA sebanyak 20.250 lembar saham atau setara dengan 90,00% dengan nilai nominal Rp20.250.000.000 (nilai penuh).
- Saham LEGI sebanyak 92.109 lembar saham atau setara dengan 99,00% dengan nilai nominal Rp92.109.000.000 (nilai penuh).

Berdasarkan Akta No. 21 tanggal 26 Maret 2025 dari Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., para pemegang saham menyetujui diantaranya:

- Perubahan jenis saham pada SPJM yang semula tanpa Seri menjadi terdiri saham Seri A dan Seri B atas saham yang sudah disetorkan sebelumnya oleh Perusahaan dan ILCS diklasifikasikan sebagai saham Seri A serta menyetujui penerbitan saham baru Seri B dengan jumlah 116.407 saham Seri B.
- Peningkatan modal dasar SPJM dari semula Rp6.179.088.000.000 (nilai penuh) menjadi Rp6.180.051.186.955 (nilai penuh) dan menyetujui klasifikasi modal dasar yang terbagi atas dua saham yaitu:
  - Sebanyak 5.897.000 saham Seri A, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (nilai penuh) atau seluruhnya dengan jumlah nominal menjadi Rp5.897.000.000.000 (nilai penuh); dan
  - Sebanyak 116.407 saham Seri B, masing-masing nominal Rp2.431.565 (nilai penuh) atau seluruhnya dengan jumlah nominal Rp283.051.186.955 (nilai penuh).

1. GENERAL (continued)

d. Transfer of Shares Ownership and Issuance of New Shares (continued)

SPJM (continued)

On October 1, 2023, the following shares owned by BJTI were transferred to SPJM:

- *BIMA shares amounting to 20,250 shares or equivalent to 90.00% with nominal value of Rp20,250,000,000 (full amount).*
- *LEGI shares amounting to 92,109 shares or equivalent to 99.00% with nominal value of Rp92,109,000,000 (full amount).*

Based on Deed No. 21 dated March 26, 2025 of Notary Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., the shareholders approved, among others, the following matters:

- *The change in share classification of SPJM, which was previously unclassified, to consist of Series A and Series B shares. The shares previously paid up by the Company and ILCS were reclassified as Series A shares, and the shareholders approved the issuance of 116,407 new Series B shares.*
- *An increase in SPJM's authorized capital from Rp6,179,088,000,000 (full amount) to Rp6,180,051,186,955 (full amount), and approval of the classification of authorized capital into two share classes as follows:*
  - *5,897,000 Series A shares, each with a nominal value of Rp1,000,000 (full amount), or a total nominal value of Rp5,897,000,000,000 (full amount); and*
  - *116,407 Series B shares, each with a nominal value of Rp2,431,565 (full amount), or a total nominal value of Rp283,051,186,955 (full amount) .2,863,144 Series A shares that have been issued, each with a nominal value of Rp1,000,000 (full*
  -

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

1. UMUM (lanjutan)

d. Pengalihan Kepemilikan Saham dan Penerbitan Saham Baru (lanjutan)

SPJM (lanjutan)

Berdasarkan Akta No. 21 tanggal 26 Maret 2025 dari Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., para pemegang saham menyetujui diantaranya:

- Penambahan modal disetor dan ditempatkan dari semula Rp2.863.144.000.000 (nilai penuh) yang terbagi atas 2.863.144 saham menjadi sebesar Rp3.146.186.955 (nilai penuh) yang terbagi atas dua klasifikasi saham yaitu:
  - Saham Seri A yang telah terbit sejumlah 2.863.144 lembar saham masing-masing dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per lembar saham dan nominal seluruhnya sebesar Rp2.863.144.000.000 (nilai penuh);
- Penambahan modal disetor dan ditempatkan dari semula Rp2.863.144.000.000 (nilai penuh) yang terbagi atas 2.863.144 saham menjadi sebesar Rp3.146.186.955 (nilai penuh) yang terbagi atas dua klasifikasi saham yaitu: (lanjutan)
  - Saham Seri B sejumlah 116.407 lembar saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp2.431.565 (nilai penuh) dan nominal seluruhnya sebesar Rp283.051.186.955 (nilai penuh) yang seluruhnya diambil alih oleh Perusahaan;

Berdasarkan Akta No. 21 tanggal 26 Maret 2025 dari Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., para pemegang saham menyetujui diantaranya:

- Susunan kepemilikan modal dan pemegang saham sebagai berikut:
  - SPJM memiliki saham Seri A sebanyak 2.862.999 lembar dan saham Seri B sebanyak 116.407 lembar dengan total nilai Rp3.145.051.186.955 (nilai penuh) atau sebesar 99,995%.
  - ILCS memiliki saham Seri A sebanyak 145 lembar dengan nilai total Rp145.000.000 (nilai penuh) atau sebesar 0,005%.

1. GENERAL (continued)

d. Transfer of Shares Ownership and Issuance of New Shares (continued)

SPJM (continued)

Based on Deed No. 21 dated March 26, 2025 of Notary Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., the shareholders approved, among others, the following matters:

- *An increase in issued and paid-up capital from Rp2,863,144,000,000 (full amount) consisting of 2,863,144 shares to Rp3,146,186,955 (full amount), consisting of two share classifications as follows:*
  - *2,863,144 Series A shares that have been issued, each with a nominal value of Rp1,000,000 (full amount) per share, representing a total nominal value of Rp2,863,144,000,000 (full amount);*
- *An increase in issued and paid-up capital from Rp2,863,144,000.000 (full amount) consisting of 2,863,144 shares to Rp3,146,186.955 (full amount), consisting of two share classifications as follows: (continued)*
  - *116,407 Series B shares, each with a nominal value of Rp2,431,565 (full amount), representing a total nominal value of Rp283,051,186,955 (full amount) all of which were subscribed by the Company.*

Based on Deed No. 21 dated March 26, 2025 of Notary Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., the shareholders approved, among others, the following matters:

- *The composition of capital ownership and shareholders is as follows:*
  - *SPJM holds 2,862,999 Series A shares and 116,407 Series B shares, with a total value of Rp3,145,051,186,955 (full amount) representing 99.995% ownership.*
  - *ILCS holds 145 Series A shares, with a total value of Rp145,000,000 (full amount), representing 0.005% ownership.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

1. UMUM (lanjutan)

d. Pengalihan Kepemilikan Saham dan Penerbitan Saham Baru (lanjutan)

Rukindo (lanjutan)

Berdasarkan Akta No. 19 tanggal 26 Maret 2025 dari Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., mengenai Penambahan Modal dan Pengambilan Saham Baru Perseroan, para pemegang saham menyetujui diantaranya:

- Perubahan jenis saham pada Rukindo yang semula tanpa Seri menjadi terdiri saham Seri A dan Seri B, atas saham yang sudah disetorkan sebelumnya oleh SPJM dan SPSL diklasifikasikan sebagai saham Seri A serta menyetujui penerbitan saham baru Seri B dengan rincian:
  - Pokok utang jangka panjang Perusahaan menjadi saham Seri B sebanyak 595.739 lembar;
  - Pokok utang modal kerja Perusahaan menjadi saham Seri B sebanyak 57.495 lembar;
  - Pokok OWK Perusahaan menjadi saham Seri B sebanyak 1.446.662 lembar.

Berdasarkan Akta No. 19 tanggal 26 Maret 2025 dari Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., mengenai Penambahan Modal dan Pengambilan Saham Baru Perseroan, para pemegang saham menyetujui diantaranya:

- Peningkatan modal dasar Rukindo dari semula Rp2.000.000.000.000 (nilai penuh) menjadi Rp2.000.000.006.822 (nilai penuh) dan menyetujui klasifikasi modal dasar yang terbagi atas dua saham yaitu:
  - Sebanyak 612.164 saham Seri A, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (nilai penuh) atau seluruhnya dengan jumlah nominal menjadi Rp612.164.000.000 (nilai penuh);
  - Sebanyak 10.296.054 saham Seri B, masing-masing nominal Rp134.793 (nilai penuh) atau seluruhnya dengan jumlah nominal Rp1.387.836.006.822 (nilai penuh).

1. GENERAL (continued)

d. Transfer of Shares Ownership and Issuance of New Shares (continued)

Rukindo (continued)

Based on Deed No. 19 dated March 26, 2025 of Notary Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., regarding the Capital Increase and Subscription of New Shares of the Company, the shareholders approved, among others, the following matters:

- *The change in share classification of Rukindo, which was previously unclassified, to consist of Series A and Series B shares that previously paid up by SPJM and SPSL were reclassified as Series A shares, and the shareholders approved the issuance of new Series B shares with the following details:*
  - *Conversion of the Company's long-term loan principal into 595,739 Series B shares;*
  - *Conversion of the Company's working capital loan principal into 57,495 Series B shares;*
  - *Conversion of the Company's OWK principal into 1,446,662 Series B.*

Based on Deed No. 19 dated March 26, 2025 of Notary Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., regarding the Capital Increase and Subscription of New Shares of the Company, the shareholders approved, among others, the following matters:

- *An increase in Rukindo's authorized capital from previously Rp2,000,000,000,000 (full amount) to Rp2,000,000,006,822 (full amount), and approval of the classification of authorized capital divided into two share classes as follows:*
  - *612,164 Series A shares, each with a nominal value of Rp1,000,000 (full amount), or a total nominal value of Rp612,164,000,000 (full amount);*
  - *10,296,054 Series B shares, each with a nominal value of Rp134,793 (nilai penuh), or a total nominal value of Rp1,387,836,006,822 (full amount).*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

1. UMUM (lanjutan)

d. Pengalihan Kepemilikan Saham dan Penerbitan Saham Baru (lanjutan)

Rukindo (lanjutan)

Berdasarkan Akta No. 20 tanggal 26 Maret 2025 dari Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., mengenai Persetujuan Pemindahan Hak atas Saham, para pemegang saham menerima dan menyetujui pemindahan hak atas saham seluruh saham Perusahaan sebanyak 2.099.896 saham yang mewakili 77,428% kepada SPJM. Sehingga setelah pemindahan hak atas saham tersebut, susunan pemegang saham Rukindo berubah menjadi:

- SPJM sebanyak 2.711.518 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp894.673.281.528 (nilai penuh) mewaliki 99,98% dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh yang terdiri dari:
  - Saham seri A sebanyak 611.622 saham dengan nilai nominal seluruhnya; sebesar Rp611.622.000.000 (nilai penuh).
  - Saham seri B sebanyak 2.099.896 dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp283.051.281.528 (nilai penuh).
- SPSL sebanyak 542 saham seri A dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp542.000.000.000 (nilai penuh).

SPMT

Pada tanggal 3 Januari 2022, saham-saham milik Perusahaan berikut dialihkan kepada SPMT:

- Saham IKT sebanyak 1.296.144.749 lembar saham atau setara dengan 71,28% dengan nilai nominal Rp129.614.474.900 (nilai penuh).
- Saham PTPR sebanyak 24.750 lembar saham atau setara dengan 99,00% dengan nilai nominal Rp24.750.000.000 (nilai penuh).

1. GENERAL (continued)

d. Transfer of Shares Ownership and Issuance of New Shares (continued)

Rukindo (continued)

Based on Deed No. 20 dated March 26, 2025 of Notary Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., regarding the Approval of the Transfer of Share Rights, the shareholders acknowledged and approved the transfer of rights over all 2,099,896 shares of the Company, representing 77.428%, to SPJM. Following the transfer of share rights, the composition of Rukindo's shareholders became as follows:

- *SPJM shares amounting to 2,711,518 shares with a total nominal value of Rp894,673,281,528 (full amount) representing 99.98% of the total issued and fully paid shares, consisting of:*
  - *611,622 Series A shares, with a total nominal value of Rp611,622,000,000 (full amount).*
  - *2,099,896 Series B shares, with a total nominal value of Rp283,051,281.528 (full amount).*
- *SPSL shares amounting to 542 Series A shares, with a total nominal value of Rp542,000,000,000 (full amount).*

SPMT

On January 3, 2022, the following shares owned by the Company were transferred to SPMT:

- *IKT shares amounting to 1,296,144,749 shares or equivalent to 71.28% with nominal value of Rp129,614,474,900 (full amount).*
- *PTPR shares amounting to 24,750 shares or equivalent to 99.00% with nominal value of Rp24,750,000,000 (full amount).*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

1. UMUM (lanjutan)

d. Pengalihan Kepemilikan Saham dan Penerbitan Saham Baru (lanjutan)

SPMT (lanjutan)

Pengalihan saham tersebut telah melalui persetujuan Kementerian BUMN melalui surat No. S-1049/MBU/12/2021 pada tanggal 30 Desember 2021. Berdasarkan surat tersebut, nilai pengambilalihan saham selanjutnya perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan valuasi nilai wajar oleh konsultan independen.

Sehubungan dengan pengalihan hak atas saham tersebut, SPMT menerbitkan 129.614 saham baru dan 24.750 saham baru untuk Perusahaan dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham masing-masing sebagai kompensasi pengalihan saham IKT dan PTPR dari Perusahaan kepada SPMT.

Peningkatan modal dasar, penerbitan saham baru serta pengalihan saham tersebut telah diberitahukan dan disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 3 Januari 2022.

Menindaklanjuti surat Kementerian BUMN di atas, berdasarkan Akta No. 9 dari Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, tanggal 27 April 2022, SPMT melakukan penerbitan 1.151.941 lembar saham baru dengan nilai nominal Rp1.151.941.000 yang seluruhnya diambil bagian oleh Perusahaan sebagai kompensasi penyesuaian nilai wajar saham entitas anak yang dialihkan dari Perusahaan ke SPMT. Nilai wajar saham entitas anak didasarkan pada laporan KJPP Suwendho, Rinaldy dan Rekan, penilai independen, tanggal 31 Maret 2022. Akta tersebut telah diberitahunkan kepada oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui suratnya No. AHU-AH.01.03-0002173 Tahun 2022 tanggal 27 April 2022.

Pengalihan saham tersebut di atas memenuhi kategori kombinasi bisnis antara entitas sepengendali sebagaimana diuraikan di dalam PSAK 338 tentang “Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali”, dengan demikian, transaksi pengalihan saham tersebut diakui menggunakan metode penyatuan kepentingan.

1. GENERAL (continued)

d. Transfer of Shares Ownership and Issuance of New Shares (continued)

SPMT (continued)

The transfer of shares has been approved by the Ministry of SOE through its letter No. S-1049/MBU/12/2021 on December 30, 2021. Based on the letter, the shares transfer value need to be followed by adjustment based on the fair value valuation by independent consultant.

In relation to such transfer of right of shares, SPMT issued 129,614 new shares and 24,750 new shares for the Company with nominal value of Rp1,000,000 (full amount) per share as compensation for the transfer of IKT and PTPR shares from the Company to SPMT, respectively.

The increase of authorized capital, the issuance of new shares and the transfers of shares has been notified to and approved by The Ministry of Law and Human Rights dated January 3, 2022.

To follow up the letter from the Ministry of SOE above, based on Deed No. 9 of Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., notary in Jakarta, dated April 27, 2022, SPMT performed issuance of 1,151,941 new shares with nominal value of Rp1,151,941,000 which taken fully by the Company as a compensation for fair value adjustment of the subsidiaries’ shares that were transferred from the Company to SPMT. The fair value of subsidiaries’ shares were based on KJPP Suwendho, Rinaldy dan Rekan report, an independent appraisal, dated March 31, 2022. The Deed has been notified to the Ministry of Law and Human Rights through its letter No. AHU-AH.01.03-0002173 Tahun 2022 dated April 27, 2022.

The transfers of shares meet the criteria of business combination of entities under common control as described in PSAK 338 concerning "Business Combinations of Entities Under Common Control", therefore, the transfers of shares is recognized using the pooling of interest method.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

1. UMUM (lanjutan)

d. Pengalihan Kepemilikan Saham dan Penerbitan Saham Baru (lanjutan)

PTPR

Pada tanggal 18 April 2023, PTPR membeli saham P3TPK dari TPS dan Koperasi Pegawai Pelabuhan Indonesia (Kopelindo), dengan total 500 saham atau 100% dari total saham P3TPK, dengan skema sebagai berikut:

- Penjualan dan pengalihan 495 saham yang dimiliki oleh TPS.

TPS dan PTPR sepakat tentang harga pembelian saham sebesar Rp1.351.414 (nilai penuh) per saham, dengan total harga pembelian Rp668.949.930 (nilai penuh) untuk 495 saham. Kopelindo dan PTPR sepakat tentang harga pembelian saham sebesar Rp1.351.414 (nilai penuh) per saham, dengan total harga pembelian Rp6.757.070 (nilai penuh) untuk 5 saham.

PTPR telah melakukan pembayaran atas pengalihan saham tersebut kepada TPS dan Kopelindo pada tanggal 28 April 2023.

SPSL

Pada tanggal 28 Februari 2022, saham-saham milik Perusahaan berikut dialihkan kepada SPSL:

- Saham MTI sebanyak 34.283.150 lembar saham atau setara dengan 99,00% dengan nilai nominal Rp17.141.575.000 (nilai penuh).
- Saham NTS sebanyak 60.240 lembar saham atau setara dengan 99,16% dengan nilai nominal Rp60.240.000.000 (nilai penuh).
- Saham PIL sebanyak 204.820 lembar saham atau setara dengan 99,67% dengan nilai nominal Rp204.820.000.000 (nilai penuh).

1. GENERAL (continued)

d. Transfer of Shares Ownership and Issuance of New Shares (continued)

PTPR

On April 18, 2023, PTPR purchased shares of P3TPK from TPS and the Koperasi Pegawai Pelabuhan Indonesia (Kopelindo), totaling 500 shares, or 100% of the total shares, with the following scheme:

- *Sale and transfer of 495 shares owned by TPS.*

TPS and PTPR agreed on a share purchase price of Rp1,351,414 (full amount) per share, with a total purchase price of Rp668,949,930 (full amount) for the 495 shares. Kopelindo and PTPR agreed on a share purchase price of Rp1,351,414 (full amount) per share, with a total purchase price of Rp6,757,070 (full amount) for the 5 shares.

PTPR has made payment of the shares transfer to TPS and Kopelindo on April 28, 2023.

SPSL

On February 28, 2022, the following shares owned by the Company were transferred to SPSL:

- *MTI shares amounting to 34,283,150 shares or equivalent to 99.00% with nominal value of Rp17,141,575,000 (full amount).*
- *NTS shares amounting to 60,240 shares or equivalent to 99.16% with nominal value of Rp60,240,000,000 (full amount).*
- *PIL shares amounting to 204,820 shares or equivalent to 99.67% with nominal value of Rp204,820,000,000 (full amount).*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

1. UMUM (lanjutan)

d. Pengalihan Kepemilikan Saham dan Penerbitan Saham Baru (lanjutan)

SPSL (lanjutan)

Pada tanggal 28 Februari 2022, saham-saham milik Perusahaan berikut dialihkan kepada SPSL: (lanjutan)

- Saham PPK sebanyak 759.000 lembar saham atau setara dengan 90,00% dengan nilai nominal Rp759.000.000.000 (nilai penuh).
- Saham PLI (dahulu SPSL) sebanyak 101.898 lembar saham atau setara dengan 99,90% dengan nilai nominal Rp101.898.000.000 (nilai penuh).

Pengalihan saham tersebut telah melalui persetujuan Kementerian BUMN melalui suratnya No. S-133/MBU/02/2022 pada tanggal 25 Februari 2022. Berdasarkan surat tersebut, nilai pengambilalihan saham selanjutnya perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan valuasi nilai wajar oleh konsultan independen.

Sehubungan dengan pengalihan hak atas saham tersebut, SPSL menerbitkan 1.714.157 saham baru, 6.024.000 saham baru, 20.482.000 saham baru, 75.900.000 saham baru dan 10.189.800 saham baru untuk Perusahaan dengan nilai nominal Rp10.000 (nilai penuh) per saham masing-masing sebagai kompensasi pengalihan saham MTI, NTS, PIL, PPK dan PLI dari Perusahaan kepada SPSL.

Pada tanggal 1 Oktober 2023, MTI menggabungkan diri dengan NTS, dimana MTI sebagai entitas yang melanjutkan kegiatan usaha.

Peningkatan modal dasar, penerbitan saham baru serta pengalihan saham tersebut telah diberitahukan dan disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 1 Maret 2022.

1. GENERAL (continued)

d. Transfer of Shares Ownership and Issuance of New Shares (continued)

SPSL (lanjutan)

On February 28, 2022, the following shares owned by the Company were transferred to SPSL: (continued)

- *PPK shares amounting to 759,000 shares or equivalent to 90.00% with nominal value of Rp759,000,000,000 (full amount).*
- *PLI (formerly SPSL) shares amounting to 101,898 shares or equivalent to 99.90% with nominal value of Rp101,898,000,000 (full amount).*

The transfer of shares has been approved by the Ministry SOE through its letter No. S-133/MBU/02/2022 on February 25, 2022. Based on the letter, the shares transfer value need to be followed by adjustment based on the fair value valuation by independent consultant.

In relation to such transfer of right of shares, SPSL issued 1,714,157 new shares, 6,024,000 new shares, 20,482,000 new shares, 75,900,000 new shares and 10,189,800 new shares for the Company with nominal value of Rp10,000 (full amount) per share as compensation for the transfer of MTI, NTS, PIL, PPK and PLI shares from the Company to SPSL, respectively.

On October 1, 2023, MTI agreed to merge with NTS, where MTI as the surviving entity.

The increase of authorized capital, the issuance of new shares and the transfers of shares has been notified to and approved by The Ministry of Law and Human Rights dated March 1, 2022.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

1. UMUM (lanjutan)

d. Pengalihan Kepemilikan Saham dan Penerbitan Saham Baru (lanjutan)

SPSL (lanjutan)

Menindaklanjuti surat Kementerian BUMN di atas, berdasarkan Akta No. 6 dari Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, tanggal 27 April 2022, SPSL melakukan penerbitan 77.270.475 lembar saham baru dengan nilai nominal Rp772.704.750 yang seluruhnya diambil bagian oleh Perusahaan sebagai kompensasi penyesuaian nilai wajar saham entitas anak yang dialihkan dari Perusahaan ke SPSL. Nilai wajar saham entitas anak didasarkan pada laporan KJPP Suwendho, Rinaldy dan Rekan, penilai independen, tanggal 31 Maret 2022. Akta tersebut telah diberitahunkan kepada oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui suratnya No. AHU-AH.01.03-0232765 Tahun 2022 tanggal 27 April 2022.

Pengalihan saham tersebut di atas memenuhi kategori kombinasi bisnis antara entitas sepengendali sebagaimana diuraikan di dalam PSAK 338 tentang "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali", dengan demikian, transaksi pengalihan saham tersebut diakui menggunakan metode penyatuan kepentingan.

PTP1

Berdasarkan Akta No. 10 tanggal 26 Juli 2022 dari Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, SPTP mengakuisisi saham seluruh PTP1 milik PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan PT Hutama Karya (Persero) masing-masing sebanyak 183.370.000 saham dengan nilai pembelian masing-masing sebesar Rp187.954.250. Dengan demikian, kepemilikan SPTP pada PTP1 mengalami peningkatan dari 70,00% menjadi 100,00%. Akta tersebut telah diberitahunkan kepada oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui suratnya No. AHU-AH.01.09-0036981 Tahun 2022 tanggal 26 Juli 2022.

SPTP telah melakukan pembayaran atas pengalihan saham tersebut kepada PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan PT Hutama Karya (Persero) pada tanggal 25 Juli 2022.

1. GENERAL (continued)

d. Transfer of Shares Ownership and Issuance of New Shares (continued)

SPSL (lanjutan)

To follow up the letter from the Ministry of SOE above, based on Deed No. 6 of Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., notary in Jakarta, dated April 27, 2022, SPSL performed issuance of 77,270,475 new shares with nominal value of Rp772,704,750 which taken fully by the Company as a compensation for fair value adjustment of the subsidiaries' shares that were transferred from the Company to SPSL. The fair value of subsidiaries' shares were based on KJPP Suwendho, Rinaldy dan Rekan report, an independent appraisal, dated March 31, 2022. The Deed has been notified to the Ministry of Law and Human Rights through its letter No. AHU-AH.01.03-0232765 Tahun 2022 dated April 27, 2022.

The transfers of shares meet the criteria of business combination of entities under common control as described in PSAK 338 concerning "Business Combinations of Entities Under Common Control", therefore, the transfers of shares is recognized using the pooling of interest method.

PTP1

Based on deed No. 10 dated July 26, 2022 of Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, SPTP acquired all PTP1 shares owned by PT Wijaya Karya (Persero) Tbk and PT Hutama Karya (Persero) amounting to 183,370,000 shares, respectively, with purchase price of Rp187,954,250, respectively. Therefore, SPTP ownerships in PTP1 increased from 70.00% to 100.00%. The Deed has been notified to the Ministry of Law and Human Rights through its letter No. AHU-AH.01.09-0036981 Tahun 2022 dated July 26, 2022.

SPTP has made payment of the shares transfer to PT Wijaya Karya (Persero) Tbk and PT Hutama Karya (Persero) on July 25, 2022.

1. UMUM (lanjutan)

d. Pengalihan Kepemilikan Saham dan Penerbitan Saham Baru (lanjutan)

PTP1 (lanjutan)

Pengalihan saham tersebut di atas memenuhi kategori kombinasi bisnis antara entitas sepengendali sebagaimana diuraikan di dalam PSAK 338 tentang "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali". Selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dengan jumlah penambahan aset neto di PTP1 diakui sebagai bagian dari akun "Tambahan Modal Disetor" pada laporan posisi keuangan konsolidasian dengan perhitungan sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

d. Transfer of Shares Ownership and Issuance of New Shares (continued)

PTP1 (continued)

The transfers of shares meet the criteria of business combination of entities under common control as described in PSAK 338 concerning "Business Combinations of Entities Under Common Control".
The difference between the consideration paid and the carrying amount of the net assets in PTP1 is recognized as part of the "Additional Paid-in Capital" account in the consolidated statement of financial position with calculation as follows:

	Nilai yang diakui pada saat transaksi/ *Amount recognized on transaction*	
Peningkatan aset neto	302.382.814	*Increase in net assets*
Imbalan yang dialihkan	375.908.500	*Consideration paid*
Tambahan modal disetor (Catatan 33)	**(73.525.686)**	***Additional paid-in capital (Note 33)***

PMT

Berdasarkan keputusan RUPS Sirkuler PMT tanggal 24 Oktober 2022 tentang Penambahan Modal dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, para pemegang saham PMT menyetujui diantaranya:

- Menerima dan menyetujui penambahan modal dasar dari semula Rp3.177.000.000 yang terbagi atas 3.177.000 saham menjadi Rp9.001.395.800 yang terbagi atas 56.077.000 saham, dengan rincian:
  - Saham seri A sejumlah 3.177.000 saham dengan nilai nominal Rp3.177.000.000 (Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham).
  - Saham seri B sejumlah 52.900.000 saham dengan nilai nominal Rp5.824.395.800 (Rp110.102 (nilai penuh) per saham).

PMT

Based on the resolution of PMT's Circular Shareholders meeting dated October 24, 2022 concerning Capital Increase and Amendment to the Company's Articles of Association, PMT's shareholders approved among others:.

- *Received and approved the increase in authorized capital from the original Rp3,177,000,000 divided into 3,177,000 shares to Rp9,001,395,800 divided into 56,077,000 shares, with details:*
  - *Series A shares totaling 3,177,000 shares with a nominal value of Rp3,177,000,000 (Rp1,000,000 (full amount) per share).*
  - *Series B shares totaling 52,900,000 shares with a nominal value of Rp5,824,395,800 (Rp110,102 (full amount) per share).*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

1. UMUM (lanjutan)

d. Pengalihan Kepemilikan Saham dan Penerbitan Saham Baru (lanjutan)

PMT (lanjutan)

Berdasarkan keputusan RUPS Sirkuler PMT tanggal 24 Oktober 2022 tentang Penambahan Modal dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, para pemegang saham PMT menyetujui diantaranya: (lanjutan)

- Menerima dan menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor dari semula Rp1.467.360.000 yang terbagi atas 1.467.360 saham menjadi sebesar Rp4.504.361.049 yang terbagi atas 2 klasifikasi saham:
  - Saham seri A (saham preferen) sejumlah 1.467.360 saham dengan nilai nominal Rp1.467.360.000 yang memiliki hak prioritas untuk menerima tahapan pembayaran dividen terlebih dahulu dari saham seri B.
  - Saham seri B (saham biasa) sejumlah 27.583.523 saham dengan nilai nominal Rp3.037.001.049, yang seluruhnya diambil oleh Perusahaan dan dibayarkan dengan cara konversi pinjaman menjadi modal sebesar Rp466.878.000 dan setoran tunai sebesar Rp2.570.123.049.
- Menerima dan menyetujui pemberian hak put option kepada PT PP (Persero) Tbk dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk, dimana saham seri A yang dimiliki PT PP (Persero) Tbk dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk akan dibeli oleh Perusahaan dengan harga nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham ketika berdasarkan hasil valuasi penilai independen sudah mencapai harga nominal tersebut dan tidak lebih dari 7,5% di atas nominal.

Penerbitan saham tersebut di atas memenuhi kategori kombinasi bisnis antara entitas sepengendali sebagaimana diuraikan di dalam PSAK 338 tentang “Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali”. Selisih sebesar Rp55.682.866 yang timbul atas perubahan nilai buku investasi setelah penerbitan saham baru dicatat sebagai bagian dari akun “Tambahan Modal Disetor” pada laporan posisi keuangan konsolidasian (Catatan 33).

1. GENERAL (continued)

d. Transfer of Shares Ownership and Issuance of New Shares (continued)

PMT (continued)

Based on the resolution of PMT's Circular Shareholders meeting dated October 24, 2022 concerning Capital Increase and Amendment to the Company's Articles of Association, PMT's shareholders approved among others: (continued)

- *Received and approved the increase in issued and paid-up capital from the original Rp1,467,360,000 divided into 1,467,360 shares to Rp4,504,361,049 divided into 2 classifications of shares:*
  - *Series A shares (preferred shares) amounting to 1,467,360 shares with a nominal value of Rp1,467,360,000 which have priority rights to receive dividend payment tranches in advance of series B shares.*
  - *Series B shares (ordinary shares) totaling 27,583,523 shares with a nominal value of Rp3,037,001,049, all of which were subscribed by the Company and paid by way of conversion of loan into capital amounting to Rp466,878,000 and cash deposit amounting to Rp2,570,123,049.*
- *Received and approved the granting of put option rights to PT PP (Persero) Tbk and PT Waskita Karya (Persero) Tbk, where the Series A shares owned by PT PP (Persero) Tbk and PT Waskita Karya (Persero) Tbk will be purchased by the Company with nominal value of Rp1,000,000 (full amount) per share when the shares reach that value based on independent appraisal valuation and not more than 7.5% above.*

The issuance of shares meet the criteria of business combination of entities under common control as described in PSAK 338 concerning "Business Combinations of Entities Under Common Control". The difference amounting to Rp55,682,866 resulting from changes in book value of investment after issuance of new shares is recognized as part of the "Additional Paid-in Capital" account in the consolidated statement of financial position (Note 33).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

1. UMUM (lanjutan)

d. Pengalihan Kepemilikan Saham dan Penerbitan Saham Baru (lanjutan)

TCU

Berdasarkan Akta No. 10 tanggal 5 Desember 2022 dari Yatiningsih, S.H., M.H., Notaris di Surabaya, SPMT mengakuisisi seluruh saham TCU milik BJTI dan PT Andahanesa Abadi masing-masing sebanyak 1.020 lembar saham dan 980 lembar saham dengan nilai pembelian masing-masing sebesar Rp153.897 dan Rp147.862. Dengan demikian, SPMT memiliki 100% saham TCU. Akta tersebut telah diberitahunkan kepada oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui suratnya No. AHU-AH.01.09-0088699 tanggal 19 Desember 2022.

SPMT telah melakukan pembayaran atas pengalihan saham tersebut kepada BJTI dan PT Andahanesa Abadi masing-masing pada tanggal 5 Desember 2022 dan 6 Desember 2022.

Berdasarkan akta No. 66 tanggal 25 Mei 2023 dari Yatiningsih, S.H., M.H., Notaris di Surabaya, SPMT mengalihkan 980 lembar saham atau 49% kepemilikan atas TCU kepada PT Indonesia Bulk Terminal dengan nilai penjualan sebesar Rp221.794, sehingga kepemilikan SPMT pada TCU menjadi 51%. Akta tersebut telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui suratnya No. AHU-AH.01.09.0121757 tanggal 25 Mei 2023.

CTP

Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Bersyarat pada tanggal 21 Juli 2021 dan Akta Jual Beli Saham yang diaktakan dengan akta Notaris Ny. Hastuti Nainggolan, S.H., M.Kn, No. 1 tanggal 1 Oktober 2021, API membeli saham CTP yang dimiliki oleh PT Waskita Toll Road (entitas dibawah pengendalian yang sama dan tidak bersifat sementara) sebanyak 1.386.131 lembar saham yang mewakili 55,00% kepemilikan saham di CTP dengan harga beli sebesar Rp2.445.141.067 sehingga kepemilikan API pada CTP mengalami peningkatan dari 45,00% menjadi 100,00%.

API telah melakukan pembayaran atas pengalihan saham tersebut kepada PT Waskita Toll Road pada tanggal 14 Oktober 2021.

1. GENERAL (continued)

d. Transfer of Shares Ownership and Issuance of New Shares (continued)

TCU

Based on Deed No. 10, dated December 5, 2022, of Yatiningsih, S.H., M.H., Notary in Surabaya, SPMT acquired all TCU shares owned by BJTI and PT Andahanesa Abadi amounting to 1,020 shares and 980 shares, respectively, with purchase price of Rp153,897 and Rp147,862, respectively. Therefore, SPMT owned 100% TCU shares. The Deed has been notified to the Ministry of Law and Human Rights through its letter No. AHU-AH.01.09-0088699, dated December 19, 2022.

SPMT has made payment of the shares transfer to BJTI and PT Andahanesa Abadi on December 5, 2022 and December 6, 2022, respectively.

Based on Deed no. 66 dated May 25, 2023 of Yatiningsih, S.H., M.H., Notary in Surabaya, SPMT transferred 980 shares or 49% ownership of TCU to PT Indonesia Bulk Terminal with a sales value of Rp221,794, which made SPMT's ownership of TCU became 51%. The Deed has been notified to the Ministry of Law and Human Rights through its letter No. AHU-AH.01.09.0121757 dated May 25, 2023.

CTP

Based on the Conditional Sales and Purchase Agreement on July 21, 2021 and The Deed of Shares Sales and Purchase which notarized by the Notarial Deed of Ny. Hastuti Nainggolan S.H., M.Kn, No. 1 dated October 1 2021, API acquired CTP's shares which owned by PT Waskita Toll Road (an entity under common control and is not temporary) amounted to 1,386,131 shares represents 55.00% shares ownership in CTP at a purchase price of Rp2,445,141,067 which made API's ownership in CTP increased from 45.00% to 100.00%.

API has made payment of the shares transfer to PT Waskita Toll Road on October 14, 2021.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

1. UMUM (lanjutan)

d. Pengalihan Kepemilikan Saham dan Penerbitan Saham Baru (lanjutan)

CTP (lanjutan)

Pembelian saham CTP sebesar 55,00% tersebut di atas oleh API memenuhi kategori kombinasi bisnis antara entitas sepengendali sebagaimana diuraikan di dalam PSAK 338 tentang "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali", dengan demikian, transaksi penambahan kepemilikan di CTP tersebut diakui menggunakan metode penyatuan kepentingan. Selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dengan jumlah penambahan aset neto di CTP diakui sebagai bagian dari akun "Tambahan Modal Disetor" pada laporan posisi keuangan konsolidasian, dengan perhitungan sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

d. Transfer of Shares Ownership and Issuance of New Shares (continued)

CTP (continued)

The acquisition of 55.00% CTP's shares by API meet the criteria of business combination entities under common control as described in PSAK 338 concerning "Business Combinations of Entities Under Common Control", therefore, the increase in ownership of CTP transaction is recognized using the pooling of interest method. The difference between the consideration paid and the carrying amount of the net assets in CTP is recognized as part of the "Additional Paid-in Capital" account in the consolidated statement of financial position, with calculation as follows:

	Nilai yang diakui pada saat transaksi/ *Amount recognized on transaction*	
Total nilai tercatat aset neto	2.256.810.554	*Total carrying amount of net assets*
55,00% dari total nilai tercatat aset neto	1.241.245.805	*55.00% of total carrying amount of net assets*
Peningkatan aset neto	**1.241.245.805**	***Increase in net assets***
Imbalan yang dialihkan	2.445.141.067	*Consideration paid*
Tambahan modal disetor (Catatan 33)	**(1.203.895.262)**	***Additional paid-in capital (Note 33)***

ILCS

Berdasarkan Akta No. 200 tanggal 29 September 2023 dari Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, SPSL menyetujui pengalihan saham ILCS kepada Koperasi Jasa Pegawai Maritim Tanjung Priok sejumlah 101.010 saham atau sebesar 1% dari total keseluruhan saham pada ILCS dengan harga transaksi Rp3.029.299. Akta tersebut telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui suratnya No. AHU-AH.01.09-0169539 tanggal 3 Oktober 2023.

ILCS

Based on Deed No. 200, dated September 29, 2023, of Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta, SPSL agreed to transfer the shares of ILCS to Koperasi Jasa Pegawai Maritim Tanjung Priok amounting to 101,010 shares or 1% of the total shares of ILCS with the purchase price of Rp3,029,299. The Deed has been notified to the Ministry of Law and Human Rights through its letter No. AHU-AH.01.09-0169539 dated October 3, 2023.

1. UMUM (lanjutan)

d. Pengalihan Kepemilikan Saham dan Penerbitan Saham Baru (lanjutan)

BNCT

Pada tanggal 23 Juni 2023, PTP1 dan PT INA-DPWorld Investment menandatangani Perjanjian Pemegang Saham dimana PTP1 dan PT INA-DPWorld Investment akan mendirikan perusahaan dengan jumlah saham sebanyak 10.000 lembar saham yang terbagi menjadi 5.100 lembar saham seri A yang dimiliki PTP1 dan 4.900 saham seri B yang dimiliki PT INA-DPWorld Investment.

Perusahaan tersebut didirikan dalam rangka pembangunan, pembiayaan, operasi dan pemeliharaan proyek Pelabuhan Belawan sesuai dengan Perjanjian Konstruksi dan Operasi yang telah disepakati.

Jika dalam suatu tahun buku perusahaan tersebut memiliki laba yang tersedia untuk didistribusikan, maka distribusi akan dilakukan pertama untuk PT INA-DPWorld Investment hingga pengembalian modal yang diperbolehkan telah tercapai dan kedua dibagikan secara proporsional kepada PT INA-DPWorld Investment dan PTP1 sesuai dengan kepemilikan saham masing-masing. Syarat dan ketentuan lainnya diatur dalam perjanjian.

Kepemilikan saham PTP1 pada perusahaan yang didirikan tidak diikuti dengan pengendalian, oleh karena itu laporan keuangan perusahaan tersebut tidak dikonsolidasi ke dalam laporan keuangan PTP1.

Perusahaan yang didirikan sehubungan dengan perjanjian diatas bernama PT Belawan New Container Terminal (“BNCT”) yang didirikan berdasarkan Akta No. 2 tanggal 1 September 2023 oleh Liestiani Wang S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, Akta pendirian ini mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0065857.AH.01.01.TAHUN 2023 pada tanggal 4 September 2023.

1. GENERAL (continued)

d. Transfer of Shares Ownership and Issuance of New Shares (continued)

BNCT

On June 23, 2023, PTP1 and PT INA-DPWorld Investment signed a Shareholders Agreement wherein PTP1 and PT INA-DPWorld Investment will establish a company with total shares amounted 10,000 shares comprising of 5,100 series A *shares owned by PTP1 and 4,900* series B *shares owned by PT INA-DPWorld Investment.*

The company was established for the purpose of construction, financing, operation and maintenance of the Belawan Port project in accordance with the agreed Construction and Operation Agreement.

If in a financial year the company has profits available for distribution, then the distribution will be made first to PT INA-DPWorld Investment until the permitted return has been achieved and secondly distributed proportionally to PT INA-DPWorld Investment and PTP1 in accordance with their respective ownerships. Other terms and conditions are stipulated in the agreement.

PTP1's ownership in the company established is not followed by control, therefore the financial statements of the company are not consolidated into the PTP1's financial statements.

The company established in relation with the above agreement is PT Belawan New Container Terminal ("BNCT") which was established based on Deed No. 2 dated September 1, 2023, by Liestiani Wang S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta. The Deed of establishment was approved by the Minister of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decision Letter No. AHU-0065857.AH.01.01. TAHUN 2023 dated September 4, 2023.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

1. UMUM (lanjutan)

d. Pengalihan Kepemilikan Saham dan Penerbitan Saham Baru (lanjutan)

PMLI

Berdasarkan Akta No. 2 tanggal 1 Februari 2024 dari Ellies Daini, S.H., M.Kn., saham PDS sebanyak 31.500 lembar saham atau setara dengan 90,00% dengan nilai nominal Rp15.750.000.000 (nilai penuh) milik Perusahaan dialihkan kepada PMLI.

Pengalihan saham tersebut telah melalui persetujuan Kementerian BUMN melalui suratnya No. S4/MBU/01/2024 pada tanggal 3 Januari 2024.

Sehubungan dengan pengalihan hak atas saham tersebut, PMLI menerbitkan 83.465 saham baru untuk Perusahaan dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham sebagai kompensasi pengalihan saham PDS dari Perusahaan kepada PMLI.

e. Mata Uang Pelaporan

Mata uang fungsional Grup adalah Rupiah, kecuali TPK Koja, NPCT1, JICT dan BNCT dalam Dolar Amerika Serikat.

Mata uang penyajian laporan keuangan konsolidasian Grup adalah Rupiah.

f. Penggabungan

Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 101 Tahun 2021 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I ("Pelindo I"), Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III ("Pelindo III") dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV ("Pelindo IV") ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II ("Pelindo II") pada tanggal 1 Oktober 2021 mengatur diantaranya sebagai berikut:

- Kegiatan pengusahaan di Pelabuhan yang telah diselenggarakan beserta aset pengusahaan yang dimiliki atau dikuasai oleh Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV selanjutnya diselenggarakan dan dimiliki atau dikuasai oleh Pelindo II;

1. GENERAL (continued)

d. Transfer of Shares Ownership and Issuance of New Shares (continued)

PMLI

Based on Deed No. 2 dated February 1, 2024, of Ellies Daini, S.H., M.Kn., 31,500 shares of PDS or equivalent to 90.00% with nominal value of Rp15,750,000,000 (full amount) owned by the Company, have been transferred to PMLI.

This transfer of shares has been approved by the Ministry of SOE through its letter No. S4/MBU/01/2024 dated January 3, 2024.

In relation to such transfer of right of shares, PMLI issued 83,465 new shares for the Company with nominal value of Rp1,000,000 (full amount) per share as compensation for the transfer of PDS shares from the Company to PMLI.

e. Reporting Currency

The Group's functional currency is Rupiah, except TPK Koja, NPCT1, JICT and BNCT which are in United States Dollar.

The presentation currency of the Group's consolidated financial statements is in Rupiah.

f. Merger

Government Regulation (PP) of the Republic of Indonesia No. 101 Year 2021 regarding the Merger of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I ("Pelindo I"), Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III ("Pelindo III") and Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV ("Pelindo IV") into Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II ("Pelindo II") on October 1, 2021, stipulating among others:

- *Port operational activities that have been carried out along with the operational assets owned or controlled by Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV are subsequently managed and owned or controlled by Pelindo II;*

1. UMUM (lanjutan)

f. Penggabungan (lanjutan)

Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 101 Tahun 2021 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I ("Pelindo I"), Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III ("Pelindo III") dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV ("Pelindo IV") ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II ("Pelindo II") pada tanggal 1 Oktober 2021 mengatur diantaranya sebagai berikut: (lanjutan)

- Pelindo II wajib melakukan penyesuaian terhadap perizinan, konsesi dan dokumen hukum paling lambat 2 (dua) tahun sejak tanggal penggabungan;
- Nilai kekayaan definitif Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV yang digabungkan ke dalam Pelindo II ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan Menteri BUMN.

Berdasarkan Akta Penggabungan No. 5 tanggal 1 Oktober 2021 dari notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV setuju dan sepakat untuk menggabungkan diri dengan Pelindo II, dimana Pelindo II sebagai entitas yang melanjutkan kegiatan usaha. Rancangan penggabungan telah disetujui oleh pemegang saham masing-masing perusahaan pada tanggal yang sama sebagai berikut:

- Pernyataan Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pelindo I No. 1 tanggal 1 Oktober 2021.
- Pernyataan Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pelindo II No. 2 tanggal 1 Oktober 2021.
- Pernyataan Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pelindo III No. 3 tanggal 1 Oktober 2021.
- Pernyataan Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pelindo IV No. 4 tanggal 1 Oktober 2021.

1. GENERAL (continued)

f. Merger (lanjutan)

Government Regulation (PP) of the Republic of Indonesia No. 101 Year 2021 regarding the Merger of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I ("Pelindo I"), Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III ("Pelindo III") and Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV ("Pelindo IV") into Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II ("Pelindo II") on October 1, 2021, stipulating among others: (continued)

- *Pelindo II is required to make adjustments to permits, concessions and legal documents no later than 2 (two) years since the date of merger;*
- *The definitive net assets value of Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV which are combined into Pelindo II are determined by the Minister of Finance based on the proposal of the Minister of SOE.*

Based on the Deed of Merger No. 5 dated October 1, 2021 from the notary Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV agreed to merge with Pelindo II, where Pelindo II as the surviving entity. The plan design of merger was approved by the shareholders of each company on the same date as follows:

- *Statement of the Decree of the Minister of SOE as Pelindo I General Shareholders Meeting (GSM) No. 1 on October 1, 2021;*
- *Statement of the Decree of the Minister of SOE as Pelindo II General Shareholders Meeting (GSM) No. 2 on October 1, 2021*
- *Statement of the Decree of the Minister of SOE as Pelindo III General Shareholders Meeting (GSM) No. 3 on October 1, 2021.*
- *Statement of the Decree of the Minister of SOE as Pelindo IV General Shareholders Meeting (GSM) No. 4 on October 1, 2021.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

1. UMUM (lanjutan)

f. Penggabungan (lanjutan)

Berdasarkan Akta Penggabungan No. 5 tersebut, seluruh pihak menyetujui penggabungan dengan kondisi diantaranya sebagai berikut:

1. Semua operasi, usaha, kegiatan dan aktivitas dari Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV beralih kepada Pelindo II.
2. Semua izin, konsesi, fasilitas, lisensi, persetujuan dan pemanfaatan yang telah diberikan oleh pihak yang berwenang kepada Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV beralih ke Pelindo II.
3. Sejak tanggal efektif, seluruh aset dan liabilitas yang dimiliki oleh Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV beralih ke Pelindo II.
4. Seluruh pekerja Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV akan menjadi pekerja Pelindo II mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tenaga kerja dan Berita Acara Kesepakatan antara Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III dan Pelindo IV dengan para pengurus serikat pekerja Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III dan Pelindo IV tanggal 24 Juni 2021.

Komposisi modal saham Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III dan Pelindo IV sebelum dan setelah penggabungan adalah sebagai berikut (nilai penuh):

1. GENERAL (continued)

f. Merger (continued)

Based on the Deed of Merger No. 5, all parties agreed to the merger with the following conditions among others:

1. *All operations, businesses, and activities of Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV are transferred to Pelindo II.*
2. *All permits, concessions, facilities, licenses, approvals and utilizations that have been granted by the authorities to Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV are transferred to Pelindo II.*
3. *Since the effective date, all assets and liabilities owned by Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV are transferred to Pelindo II.*
4. *All Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV workers will become Pelindo II workers in accordance with the provisions of the laws and regulations regarding labor and the Minutes of Agreement between Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III and Pelindo IV with the management of the Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III and Pelindo IV labor union on June 24, 2021.*

The composition of the share capital of Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III and Pelindo IV before and after the merger are as follows (full amount):

Sebelum Penggabungan		***Before Merger***
Pelindo I		***Pelindo I***
Modal Dasar	Rp6.800.000.000	*Authorized capital*
Modal ditempatkan dan disetor penuh	Rp1.700.000.000	*Issued and fully-paid capital*
Pelindo II		***Pelindo II***
Modal Dasar	Rp4.000.000.000	*Authorized capital*
Modal ditempatkan dan disetor penuh	Rp1.444.029.000	*Issued and fully-paid capital*
Pelindo III		***Pelindo III***
Modal Dasar	Rp3.200.000.000	*Authorized capital*
Modal ditempatkan dan disetor penuh	Rp2.218.953.000	*Issued and fully-paid capital*
Pelindo IV		***Pelindo IV***
Modal Dasar	Rp10.000.000.000	*Authorized capital*
Modal ditempatkan dan disetor penuh	Rp3.112.085.000	*Issued and fully-paid capital*
Setelah Penggabungan		***After Merger***
Pelindo II		***Pelindo II***
Modal Dasar	Rp33.000.000.000	*Authorized capital*
Modal ditempatkan dan disetor penuh	Rp8.475.067.000	*Issued and fully-paid capital*

1. UMUM (lanjutan)

f. Penggabungan (lanjutan)

Saham Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III dan Pelindo IV memiliki nilai nominal saham yang sama, yaitu sebesar Rp1.000 per saham. Sehubungan penggabungan, Pelindo II akan menerbitkan saham baru kepada Negara Republik Indonesia sesuai dengan jumlah saham yang sebelumnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia pada Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV. Hal ini merupakan nilai sementara atas Pelindo II dimana nilai definitif atas Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV yang digabung ke dalam Pelindo II akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan Menteri BUMN.

Berdasarkan Akta Penggabungan No. 5 tersebut, dinyatakan bahwa tanggal efektif penggabungan adalah pada saat terbitnya Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas Pelindo II sehubungan penggabungan, yaitu melalui suratnya No. AHU-AH.01.10-0014401 tanggal 1 Oktober 2021. Dengan efektifnya penggabungan ini, maka Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV selaku perusahaan yang menggabungkan diri menjadi bubar demi hukum sejak tanggal tersebut.

Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya pada tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah menyajikan dampak dari penggabungan tersebut.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan No. 7 tanggal 1 Oktober 2021, pemegang saham Perusahaan menyetujui diantaranya perubahan Anggaran Dasar, logo dan nama Perusahaan dari sebelumnya Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia atau disingkat PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui suratnya No. AHU-0053936.AH.01.02 tanggal 1 Oktober 2021.

1. GENERAL (continued)

f. Merger (continued)

The shares of Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III and Pelindo IV have the same nominal value, which is Rp1,000 per share. In connection with the merger, Pelindo II will issue new shares to the Republic of Indonesia in accordance with the number of shares previously owned by the Republic of Indonesia in Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV. This is a temporer value for Pelindo II where the definitive value for Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV which are merged into Pelindo II will be determined by the Minister of Finance based on the proposal of the Minister of SOEs.

Based on the above Deed of Merger No. 5, it is stated that the effective date of the merger is the date of issuance of the Receipt Notification of the Merger of the Entities from the Minister of Law and Human Rights of Pelindo II in connection with the merger, which is through its letter No. AHU-AH.01.10-0014401 dated October 1, 2021. With the commencement of this merger, Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV as the merging entities are dissolved by law since that date.

The consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries as of December 31, 2021 and for the year then ended, have presented the effects of the merger.

Based on the Deed of General Meeting of Shareholders Decision No. 7 dated October 1, 2021, the shareholders approved among others the changes of Article of Association, logo and name of the Company from Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II to Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia or abbreviated PT Pelabuhan Indonesia (Persero). This amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through its letter No. AHU-0053936.AH.01.02 dated October 1, 2021.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

1. UMUM (lanjutan)

f. Penggabungan (lanjutan)

Pengalihan aset dan liabilitas Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV ke Pelindo II dicatat berdasarkan metode penyatuan kepemilikan sesuai dengan PSAK 338, "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali".

Berdasarkan PSAK 338, pengalihan aset, liabilitas, saham dan/atau instrumen kepemilikan lain antara entitas sepengendali tidak akan menghasilkan suatu laba atau rugi bagi Perusahaan atau entitas individual yang berada dalam Grup yang sama.

Oleh karena transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali tidak mengubah substansi ekonomi atas kepemilikan aset, liabilitas, saham atau instrumen kepemilikan lain yang dipertukarkan, aset atau liabilitas yang dialihkan harus dicatat berdasarkan nilai buku yang menggunakan metode penyatuan kepentingan.

Dalam pelaksanaan metode penyatuan kepentingan, komponen-komponen laporan keuangan konsolidasian selama penggabungan terjadi disajikan seolah-olah penggabungan tersebut telah terjadi sejak awal periode penyajian paling awal.

Penggabungan tersebut di atas menggunakan nilai buku mendasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) No. 56/PMK.010/2021 tanggal 4 Juni 2021 tentang Perubahan kedua atas PMK No. 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran atau Pengambilan Usaha serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-21/PJ/2021 tanggal 9 Desember 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-03/PJ/2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penerbitan Keputusan mengenai Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran atau Pengambilan Usaha.

1. GENERAL (continued)

f. Merger (continued)

The transfer of assets and liabilities of Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV to Pelindo II are recorded based on the pooling of interest method in accordance with PSAK 338, "Business Combination of Entities Under Common Control".

Based on PSAK 338, the transfer of assets, liabilities, shares and/or other ownership instruments between entities under common control will not result in a profit or loss for the Company or individual entities that are in the same group.

Because of restructuring transactions between entities under common control do not change the economic substance of the ownership of the assets, liabilities, shares or other ownership instruments that are exchanged, the transferred assets or liabilities must be recorded at their book value using the pooling of interest method.

In applying the pool of interests method, the components of the consolidated financial statements during the merger occurred are presented as if the merger had occurred since the beginning of the earliest presentation period.

Such merger as mentioned above is using book value which based on Regulation of The Minister of Finance of The Republic of Indonesia (PMK) No. 56/PMK.010/2021 dated June 4, 2021 regarding Second Amendment on PMK No. 52/PMK.010/2017 regarding The Use of Book Value on Transfer of Assets in relation to Merger, Consolidation, Expansion or Business Takeover and General Director of Tax Regulation No. PER-21/PJ/2021 dated December 9, 2021 regarding Amendment on General Director of Tax Regulation No. PER-03/PJ/2021 regarding Procedures of Proposal and Issuance on Using Book Value for The Use of Book Value on Transfer of Assets in relation to Merger, Consolidation, Expansion or Business Takeover.

1. UMUM (lanjutan)

f. Penggabungan (lanjutan)

Sesuai dengan peraturan tersebut, manajemen akan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk mendapatkan persetujuan pengggunaan nilai buku atas pengalihan aset Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV ke Perusahaan. Manajemen berkeyakinan dapat memenuhi semua persyaratan yang dipersyaratkan oleh peraturan tersebut untuk menggunakan nilai buku untuk tujuan perpajakan sehubungan dengan transaksi penggabungan.

Laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2020 dan 1 Januari 2020/31 Desember 2019 telah disajikan kembali untuk mencerminkan dampak penggabungan Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV ke dalam Perusahaan seolah-olah penggabungan tersebut telah terjadi sejak awal periode pelaporan. Penyesuaian bagian kepentingan Perusahaan atas aset neto Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV, disajikan pada "Ekuitas *Merging Entity*" pada laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2020 dan 1 Januari 2020/ 31 Desember 2019. Laba neto dari entitas yang bergabung dicatat sebagai "Laba Proforma *Merging Entity*" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun 2020.

Sehubungan dengan telah ditetapkan PP No. 101 tahun 2021 tanggal 1 Oktober 2021 tentang Penggabungan Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV ke dalam Perusahaan (dahulu Pelindo II) serta Surat Direksi Perusahaan (dahulu Pelindo II) tanggal 24 November 2021 tentang Usulan Nilai Kekayaan Definitif Perusahaan, Menteri BUMN menyampaikan usulan nilai kekayaan definitif kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui suratnya No. S-956/MBU/12/2021 tanggal 14 Desember 2021. Usulan nilai kekayaan definitif Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV yang digabungkan ke dalam Perusahaan (dahulu Pelindo II) masing-masing sebesar Rp13.373.078.900.000 (nilai penuh), Rp17.323.408.459.305 (nilai penuh) dan Rp8.435.066.761.955 (nilai penuh) berdasarkan laporan KJPP Suwendho Rinaldy dan Rekan, penilai independen, tanggal 23 September 2021.

1. GENERAL (continued)

f. Merger (continued)

In accordance with the regulation, management will submit proposal to General Director of Tax to obtain approval for using book value on the transfers of assets of Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV to the Company. Management believes that it can fulfill all requirements as required by such regulation for using book value for tax purposes in relation to the merger.

The consolidated statement of financial position as of December 31, 2020 and January 1, 2020/December 31, 2019 have been restated as if the effect of merger of Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV into the Company had occurred since the beginning of the reporting period. The adjustment of the Company's interest in the net assets of Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV is presented in "Merging Entity Equity" in the consolidated statement of financial position as of December 31, 2020 and January 1, 2020/December 31, 2019. Net income from entities merged are recorded as "Proforma Income from Merging Entity" in the 2020 consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

In relation to the establishment of PP No. 101 Year 2021 dated October 1, 2021 regarding the merger of Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV to the Company (formerly Pelindo II) and the Company's (formerly Pelindo II) Directors Letter dated November 24, 2021 regarding Proposal of Definitive Net Assets Value of the Company, the Minister of SOE delivered proposal of definitive net assets value to Minister of Finance of the Republic of Indonesia through its letter No. S-956/MBU/12/2021 dated December 14, 2021. Such proposed definitive net assets value of Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV which were merged into the Company (formerly Pelindo II) amounting to Rp13,373,078,900,000 (full amount), Rp17,323,408,459,305 (full amount) and Rp8,435,066,761,955 (full amount) based on the report of KJPP Suwendho Rinaldy dan Rekan, independent appraisal, dated September 23, 2021.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

1. UMUM (lanjutan)

f. Penggabungan (lanjutan)

Berdasarkan usulan Menteri BUMN tersebut, Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Keputusannya No.527/KMK.6/2021 tanggal 29 Desember 2021, menetapkan nilai kekayaan definitif Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV yang digabungkan ke dalam Perusahaan (dahulu Pelindo II) masing-masing sebesar Rp13.373.078.900.000 (nilai penuh), Rp17.323.408.459.305 (nilai penuh) dan Rp8.435.066.761.955 (nilai penuh).

Berdasarkan keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan Nomor S-38/MBU/01/2022 tanggal 12 Januari 2022 tentang Perubahan Struktur Permodalan dan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan, yang telah diaktakan oleh Notaris Nanda Fauz Iwan, SH., MKn., notaris di Jakarta, melalui Akta No. 2 tanggal 9 Februari 2022, pemegang saham Perusahaan menyetujui diantaranya:

- Peningkatan modal dasar Perusahaan menjadi Rp156.000.000.000.000 (nilai penuh) yang terbagi atas 156.000.000 lembar saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh).
- Pengeluaran/penempatan saham yang masih dalam simpanan (portepel) sejumlah 39.131.555 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) sehingga seluruhnya berjumlah Rp39.131.555.000.000 (nilai penuh) yang seluruhnya diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia.
- Penambahan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan sebesar Rp39.131.555.000.000 (nilai penuh):
  - Sebesar Rp13.378.078.900.000 (nilai penuh) sebagai akibat penggabungan Pelindo I ke dalam Perusahaan.
  - Sebesar Rp17.323.408.459.305 (nilai penuh) sebagai akibat penggabungan Pelindo III ke dalam Perusahaan.
  - Sebesar Rp8.435.066.761.955 (nilai penuh) sebagai akibat penggabungan Pelindo IV ke dalam Perusahaan.
  - Sebesar Rp878.740 (nilai penuh) merupakan setoran modal Negara Republik Indonesia yang berasal dari kapitalisasi sebagian cadangan Perusahaan.

1. GENERAL (continued)

f. Merger (continued)

Based on the proposal of the Minister of SOE as mentioned, the Minister of Finance of the Republic of Indonesia through its Decision No.527/KMK.6/2021 dated December 29, 2021 established the definitive net assets value of Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV which were merged into the Company (formerly Pelindo II) amounting to Rp13,373,078,900,000 (full amount), Rp17,323,408,459,305 (full amount) and Rp8,435,066,761,955 (full amount).

Based on the decision of the Minister of SOE as the GMS Number S-38/MBU/01/2022 dated January 12, 2022 regarding Changes of Capital Structure and Changes of the Company's Article of Association, which has been notarized by Nanda Fauz Iwan, SH., MKn., notary in Jakarta, through Deed No. 2 dated February 9, 2022, the Company's shareholder approved among others:

- *Increase of the Company's authorized capital to Rp156,000,000,000,000 (full amount) divided into 156,000,000 shares, each with nominal value of Rp1,000,000 (full amount).*
- *Issuance/placement of unused shares (portfolio) amounting to 39,131,555 shares, each with nominal value of Rp1,000,000 (full amount) totalling to Rp39,131,555,000,000 (full amount) which all taken by the State of The Republic of Indonesia.*

- *Additional capital by the State of The Republic of Indonesia to the Company's shares amounting to Rp39,131,555,000,000 (full amount):*
  - *Amounting to Rp13,378,078,900,000 (full amount) as a result of the merger of Pelindo I to the Company.*
  - *Amounting to Rp17,323,408,459,305 (full amount) as a result of the merger of Pelindo III to the Company.*
  - *Amounting to Rp8,435,066,761,955 (full amount) as a result of the merger of Pelindo IV to the Company.*
  - *Amounting to Rp878,740 (full amount) is a capital injection by the State of The Republic of Indonesia arising from the capitalization of part of the Company's reserves.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

1. UMUM (lanjutan)

f. Penggabungan (lanjutan)

Akta perubahan Anggaran Dasar tersebut di atas telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0014773.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 1 Maret 2022.

g. Penyelesaian Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Maret 2026. Direksi Perusahaan yang menandatangani Surat Pernyataan Direksi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut.

1. GENERAL (continued)

f. Merger (continued)

The Deed of changes in Article of Association as mentioned above has obtained approval from the Ministry of Law and Human Rights of The Republic of Indonesia Number AHU-0014773.AH.01.02.Tahun 2022 dated March 1, 2022.

g. Completion of Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia and its subsidiaries as of December 31, 2025 and for the year then ended are completed and authorized for issuance on March 31, 2026. The Company's Directors who signed the Directors' statement are responsible for the fair preparation and presentation of such consolidated financial statements.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) dan Peraturan-Peraturan serta Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian, dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali seperti yang disebutkan dalam Catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang relevan.

Laporan arus kas konsolidasian yang disajikan dengan menggunakan metode langsung, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION

a. Basis of Preparation of the Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprise the Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standards of Board of the Institute of Indonesian Chartered Accountants (Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia or DSAK IAI*) and the Regulations and Guidelines on Financial Statement Presentation and Disclosures issued by Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan or "OJK").*

The consolidated financial statements have been prepared on the accrual basis, except for the consolidated statement of cash flows, using the historical cost concept of accounting, except as disclosed in the relevant Notes to the consolidated financial statements herein.

The consolidated statement of cash flows, which have been prepared using the direct method, present receipts and disbursements of cash and cash equivalents classified into operating, investing and financing activities.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian (lanjutan)

Kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Grup adalah selaras bagi tahun yang dicakup oleh laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk standar akuntansi baru dan revisi seperti diungkapkan pada Catatan 2b di bawah ini.

Grup telah menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan dasar kelangsungan usaha.

Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini, dibulatkan dan disajikan dalam ribuan Rupiah ("Rp"), kecuali dinyatakan lain.

b. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Grup menerapkan untuk pertama kalinya beberapa standar dan amandemen tertentu yang efektif untuk periode tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025 (kecuali dinyatakan lain). Grup tidak melakukan penerapan dini atas standar, interpretasi, atau amandemen lain yang telah diterbitkan namun belum efektif.

Amandemen PSAK 221: Kekurangan Ketertukaran

Amandemen tersebut menetapkan bagaimana entitas harus menilai apakah suatu mata uang dapat dipertukarkan serta bagaimana entitas harus menentukan kurs spot ketika ketertukaran (*exchangeability*) tidak tersedia. Amandemen tersebut juga mensyaratkan pengungkapan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk memahami bagaimana ketidakmampuan mata uang tersebut untuk dipertukarkan dengan mata uang lainnya memengaruhi, atau diharapkan akan memengaruhi, kinerja keuangan, posisi keuangan, dan arus kas entitas.

Amandemen ini tidak berdampak terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

a. Basis of Preparation of the Consolidated Financial Statements (continued)

The accounting policies adopted by the Group are consistently applied for the years covered by the consolidated financial statements, except for new and revised accounting standards as disclosed in the following Note 2b.

The Group has prepared the consolidated financial statements on the going concern basis.

All figures in the consolidated financial statements are rounded to and expressed in thousands of Rupiah ("Rp"), unless otherwise stated.

b. Changes in Accounting Principles

The Group applied for the first-time certain standards and amendments, which are effective for annual periods beginning on or after January 1, 2025 (unless otherwise stated). The Group has not early adopted any other standard, interpretation or amendment that has been issued but is not yet effective.

Amendment of PSAK 221: Lack of Exchangeability

The amendments specifies how an entity should assess whether a currency is exchangeable and how it should determine a spot exchange rate when exchangeability is lacking. The amendments also require disclosure of information that enables users of its financial statements to understand how the currency not being exchangeable into the other currency affects, or is expected to affect, the entity's financial performance, financial position and cash flows.

This amendment did not have any impact on the Group's consolidated financial statements.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

b. Perubahan Kebijakan Akuntansi (lanjutan)

PSAK 117: Kontrak Asuransi

PSAK 117 merupakan standar akuntansi baru yang komprehensif mencakup pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan untuk kontrak asuransi. PSAK 117 menggantikan PSAK 104: Kontrak Asuransi. PSAK 117 berlaku untuk seluruh jenis kontrak asuransi (yaitu, jiwa, non-jiwa, asuransi langsung, dan reasuransi), tanpa memandang jenis entitas yang menerbitkannya, serta berlaku pula untuk jenis garansi tertentu dan instrumen keuangan dengan fitur partisipasi diskresioner.

Tujuan utama PSAK 117 adalah menyediakan model akuntansi yang komprehensif untuk kontrak asuransi yang lebih berguna dan konsisten bagi entitas asuransi, mencakup seluruh aspek akuntansi yang relevan. PSAK 117 didasarkan pada model umum yang dilengkapi dengan:

- Penyesuaian khusus untuk kontrak dengan fitur partisipasi langsung (*variable fee approach*)
- Pendekatan yang disederhanakan (*premium allocation approach*) yang terutama berlaku untuk kontrak berdurasi pendek

Standar baru tersebut tidak memiliki dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

c. Prinsip-Prinsip Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan entitas-entitas anak. Kendali diperoleh bila Grup terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee* dan memiliki kemampuan mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas *investee*. Dengan demikian, investor mengendalikan *investee* jika dan hanya jika investor memiliki seluruh hal berikut ini:

i) Kekuasaan atas *investee*, yaitu hak yang ada saat ini yang memberi investor kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari *investee*,
ii) Eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*, dan
iii) Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

b. Changes in Accounting Principles (continued)

PSAK 117: Insurance Contracts

PSAK 117 is a comprehensive new accounting standard for insurance contracts covering recognition and measurement, presentation and disclosure. PSAK 117 replaces PSAK 104 Insurance Contracts. PSAK 117 applies to all types of insurance contracts (i.e., life, non-life, direct insurance and re-insurance), regardless of the type of entities that issue them as well as to certain guarantees and financial instruments with discretionary participation features.

The overall objective of PSAK 117 is to provide a comprehensive accounting model for insurance contracts that is more useful and consistent for insurers, covering all relevant accounting aspects. PSAK 117 is based on a general model, supplemented by:

- *A specific adaptation for contracts with direct participation features (the variable fee approach)*
- *A simplified approach (the premium allocation approach) mainly for short-duration contracts*

The new standard had no impact on the Group's consolidated financial statements.

c. Principles of Consolidation

The consolidated financial statements comprise the financial statements of the Company and its subsidiaries. Control is achieved when the Group is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee and has the ability to affect those returns through its power over the investee. Thus, the Group controls an investee if and only if the Group has all of the following:

i) Power over the investee, that is existing rights that give the Group current ability to direct the relevant activities of the investee,
ii) Exposure, or rights, to variable returns from its involvement with the investee, and
iii) The ability to use its power over the investee to affect its returns.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Prinsip-Prinsip Konsolidasi (lanjutan)

Bila Grup tidak memiliki hak suara atau hak serupa secara mayoritas atas suatu *investee*, Grup mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan dalam mengevaluasi apakah mereka memiliki kekuasaan atas *investee*, termasuk:

i) Pengaturan kontraktual dengan pemilik hak suara lainnya dari *investee*,
ii) Hak yang timbul atas pengaturan kontraktual lain, dan
iii) Hak suara dan hak suara potensial yang dimiliki Grup.

Grup menilai kembali apakah mereka mengendalikan *investee* bila fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari ketiga elemen dari pengendalian. Konsolidasi atas entitas-entitas anak dimulai sejak Grup memperoleh pengendalian atas entitas anak dan berakhir pada saat Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak. Aset, liabilitas, penghasilan dan beban dari entitas anak yang diakuisisi pada tahun tertentu disertakan dalam laporan keuangan konsolidasian sejak tanggal Grup memperoleh kendali sampai tanggal Grup tidak lagi mengendalikan entitas anak tersebut.

Seluruh laba rugi dan setiap komponen penghasilan komprehensif lain (“PKL”) diatribusikan pada pemilik entitas induk dan pada kepentingan nonpengendali (“KNP”), walaupun hal ini akan menyebabkan saldo KNP yang defisit. Bila dipandang perlu, penyesuaian dilakukan terhadap laporan keuangan entitas anak untuk diselaraskan dengan kebijakan akuntansi Grup.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

c. Principles of Consolidation (continued)

When the Group has less than a majority of the voting or similar rights of an investee, the Group considers all relevant facts and circumstances in assessing whether it has power over an investee, including:

i) The contractual arrangement with the other vote holders of the investee,
ii) Rights arising from other contractual arrangements, and
iii) The Group's voting rights and potential voting rights.

The Group re-assesses whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control. Consolidation of a subsidiary begins when the Group obtains control over the subsidiary and ceases when the Group loses control of the subsidiary. Assets, liabilities, income and expenses of a subsidiary acquired during the year are included in the consolidated financial statements from the date the Group gains control until the date the Group ceases to control the subsidiary.

Profit or loss and each component of other comprehensive income (“OCI”) are attributed to the equity holders of the parent of the Group and to the non-controlling interests (“NCI”), even if this results in the NCI having a deficit balance. When necessary, adjustments are made to the financial statements of subsidiaries to bring their accounting policies into line with the Group’s accounting policies.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Prinsip-Prinsip Konsolidasi (lanjutan)

Seluruh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan dan beban dan arus kas atas transaksi antar anggota Grup dieliminasi sepenuhnya pada saat konsolidasi.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian, dicatat sebagai transaksi ekuitas. Bila kehilangan pengendalian atas suatu entitas anak, maka Grup menghentikan pengakuan atas aset (termasuk *goodwill*), liabilitas dan komponen lain dari ekuitas terkait, dan selisihnya diakui pada laba rugi. Bagian dari investasi yang tersisa diakui pada nilai wajar.

d. Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing

Mata uang pelaporan yang digunakan pada laporan keuangan konsolidasian adalah Rupiah, yang juga merupakan mata uang fungsional setiap entitas dalam Grup, kecuali TPK Koja, NPCT1, JICT dan BNCT dalam Dolar Amerika Serikat ("Dolar AS"). Tiap entitas dalam Grup menentukan mata uang fungsionalnya masing-masing dan laporan keuangannya masing-masing diukur menggunakan mata uang fungsional tersebut.

Transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam Rupiah berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan sesuai dengan rata-rata kurs jual dan beli yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal transaksi perbankan terakhir untuk periode yang bersangkutan, dan laba atau rugi kurs yang timbul, dikreditkan atau dibebankan pada operasi periode yang bersangkutan, kecuali untuk selisih kurs yang dapat diatribusikan ke aset tertentu dikapitalisasi ke aset dalam penyelesaian dan aset takberwujud dan selisih kurs yang diakui di dalam penghasilan komprehensif lain sebagai bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

c. Principles of Consolidation (continued)

All intra-group assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relation to transactions between members of the Group are eliminated in full on consolidation.

A change in the parent's ownership interest in a subsidiary, without a loss of control, is accounted for as an equity transaction. If the Group loses control over a subsidiary, it derecognizes the related assets (including goodwill), liabilities, NCI and other component of equity, while the difference is recognized in the profit or loss. Any investment retained is recognized at fair value.

d. Foreign Currency Transactions and Balances

The reporting currency used in the consolidated financial statements is Indonesian Rupiah, which is also each entity's in the Group functional currency, except TPK Koja, NPCT1, JICT and BNCT whose functional currency is United States Dollar ("US Dollar"). Each entity in the Group determines its own functional currency and their financial statements are measured using that functional currency.

Transactions involving foreign currencies are recorded in Indonesian Rupiah at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At the reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the average of the selling and buying rates of exchange prevailing at the last banking transaction date of the period, as published by Bank Indonesia, and any resulting gains or losses are credited or charged to operations of the current period, except for foreign exchange difference that can be attributed to qualifying assets which are capitalized to construction in progress and intangible assets and foreign exchange difference recognized in other comprehensive income as effective portion of gains and losses on hedging instruments in relation to cash flow hedge.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing (lanjutan)

Berikut ini adalah kurs mata uang asing utama yang digunakan untuk penjabaran pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 (nilai penuh):

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
Dolar Amerika Serikat (USD) 1	16.782	16.162	*United States Dollar (USD) 1*
Dolar Singapura (SGD) 1	13.069	11.919	*Singapore Dollar (SGD) 1*
Dolar Australia (AUD) 1	11.255	10.081	*Australian Dollar (AUD) 1*

Transaksi dalam mata uang asing lainnya adalah tidak signifikan.

Akun-akun dari entitas yang mata uang fungsional Dolar Amerika Serikat ("Dolar AS"), dijabarkan menjadi Rupiah dengan dasar sebagai berikut:

a) Aset dan liabilitas, baik moneter maupun non-moneter, dijabarkan dengan menggunakan kurs penutup.
b) Pendapatan dan beban dijabarkan dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi atau, bila memenuhi syarat, kurs rata-rata periode tersebut.
c) Selisih kurs yang terjadi disajikan sebagai "Penghasilan Komprehensif Lain - Selisih Kurs Penjabaran Laporan Keuangan" sebagai bagian dari ekuitas sampai pelepasan investasi neto yang bersangkutan.

e. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Perusahaan dan entitas anaknya melakukan transaksi dengan pihak berelasi sesuai dengan definisi yang diuraikan pada PSAK 224: *Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi.*

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Transaksi dan saldo yang material dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 44.

Kecuali diungkapkan khusus sebagai pihak berelasi, maka pihak-pihak lain yang disebutkan dalam Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan pihak tidak berelasi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

d. Foreign Currency Transactions and Balances (continued)

Below are the major exchange rates used for translation as of December 31, 2025 and 2024 (full amount):

Transactions in other foreign currencies are not significant.

The accounts of entity whose functional currency is United States Dollar ("US Dollar") are translated into Indonesian Rupiah on the following basis:

a) Assets and liabilities, both monetary and non-monetary, are translated using the closing rate of exchange.
b) Revenues and expenses are translated using transactions date exchange rate or, if applicable, the average rate for the period.
c) The resulting exchange difference is presented as an "Other Comprehensive Income - Exchange Differences Due to Financial Statements Translation" in the equity section until disposal of the net investment.

e. Transactions with Related Parties

The Company and subsidiaries have transactions with related parties as defined in PSAK 224: Related Party Disclosures.

The transactions are made based on terms agreed by the parties, which may not be the same as those made with unrelated parties.

Significant transactions and balances with related parties are disclosed in Note 44.

Unless specifically identified as related parties, the parties disclosed in the Notes to the consolidated financial statements are unrelated parties.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

f. Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali

Kombinasi bisnis entitas sepengendali dicatat dengan menggunakan metode penyatuan kepentingan, dimana selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dengan jumlah tercatat aset neto entitas yang diakuisisi diakui sebagai bagian dari akun "Tambahan Modal Disetor" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Dalam menerapkan metode penyatuan kepentingan tersebut, unsur-unsur laporan keuangan dari entitas yang bergabung disajikan seolah-olah penggabungan tersebut telah terjadi sejak awal periode entitas yang bergabung berada dalam kesepengendalian.

g. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian yang terdiri dari kas dan bank serta deposito jangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu 3 bulan atau kurang, yang dapat segera dikonversikan menjadi kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan.

Deposito yang jatuh tempo lebih dari 3 (tiga) bulan tetapi tidak lebih dari 1 (satu) tahun disajikan sebagai investasi jangka pendek.

h. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Biaya perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang dan identifikasi khusus. Nilai realisasi neto persediaan adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

f. Business Combinations Entities Under Common Control

Business combinations under common control are accounted for using the pooling-of-interests method, whereby the difference between the considerations transferred and the book value of the net assets of the acquiree is recognized as part of "Additional Paid-in Capital" account in the consolidated statement of financial position.

In applying the said pooling-of-interest method, the components of the financial statements of the combining entities are presented as if the combination has occurred since the beginning of the period of the combining entity become under common control.

g. Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents in the statements of consolidated financial position comprise cash on hand and in banks and short-term deposits with a maturity of three (3) months or less, that are readily convertible to a known amount of cash and subject to an insignificant risk of changes in value.

Time deposits with maturities of more than 3 (three) months but not more than 1 (one) year are presented as short-term investments.

h. Inventory

Inventories are valued at the lower of cost or net realizable value. Cost is calculated using weighted-average method and specific identification. Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business, less estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

h. Persediaan (lanjutan)

Persediaan terdiri dari suku cadang kapal dan *crane*, bahan bakar, alat tulis kantor, obat dan alat-alat medis.

Grup menetapkan penyisihan untuk nilai realisasi neto persediaan berdasarkan hasil penelaahan berkala atas kondisi fisik dan nilai realisasi neto persediaan.

i. Penurunan Nilai Aset Non-keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian penurunan nilai aset (yaitu aset takberwujud dengan umur manfaat tidak terbatas, aset takberwujud yang belum dapat digunakan, atau *goodwill* yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis) diperlukan, maka Grup membuat estimasi formal jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau Unit Penghasil Kas ("UPK") dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset atau UPK lebih besar daripada jumlah terpulihkannya, maka aset tersebut dipertimbangkan mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkannya.

Kerugian penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan, jika ada, diakui pada laba rugi sesuai dengan kategori biaya yang konsisten dengan fungsi dari aset yang diturunkan nilainya.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

h. Inventory (continued)

Inventories consists of ship and crane spare part, fuels, office supplies, medicine and medical instruments.

The Group provides allowance for net realizable value of inventories based on periodic reviews of the physical conditions and net realizable values of the inventories.

i. Impairment of Non-financial Assets

The Group assesses at the each reporting date whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists or when annual impairment testing for an asset (i.e. an intangible asset with an indefinite useful life, an intangible asset not yet available for use, or goodwill acquired in a business combination) is required, the Group makes an estimate of the asset's recoverable amount.

An asset's recoverable amount is the higher of an asset's or Cash Generating Unit ("CGU")'s fair value less costs to sell and its value in use, and is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets. Where the carrying amount of an asset or CGU exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount.

Impairment losses of continuing operations, if any, are recognized in the profit or loss in those expense categories consistent with the functions of the impaired asset.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

i. Penurunan Nilai Aset Non-keuangan (lanjutan)

Untuk aset selain *goodwill*, penilaian dilakukan pada akhir setiap tanggal pelaporan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam tahun sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset atau UPK tersebut. Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam tahun sebelumnya untuk aset selain *goodwill* dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada periode/tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui pada laba rugi. Setelah pembalikan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

Goodwill diuji untuk penurunan nilai setiap tahun dan ketika terdapat indikasi bahwa nilai tercatatnya mungkin mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai bagi *goodwill* ditetapkan dengan menentukan jumlah tercatat tiap UPK (atau kelompok UPK) terkait dari *goodwill* tersebut. Jika jumlah terpulihkan UPK kurang dari jumlah tercatatnya, rugi penurunan nilai diakui. Rugi penurunan nilai terkait *goodwill* tidak dapat dibalik pada tahun berikutnya.

j. Investasi pada Entitas Asosiasi

Entitas asosiasi adalah entitas yang terhadapnya Grup memiliki pengaruh signifikan. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional *investee*, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

i. Impairment of Non-Financial Assets (continued)

For assets excluding goodwill, an assessment is made at each reporting date as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the asset's or CGU's recoverable amount is estimated. A previously recognized impairment loss for an asset other than goodwill is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized. If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount. The reversal is limited so that the carrying amount of the assets does not exceed its recoverable amount, nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized for the asset in prior periods/years. Reversal of an impairment loss is recognized in the profit or loss. After such a reversal, the depreciation charge on the said asset is adjusted in future periods to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.

Goodwill is tested for impairment annually and when circumstances indicate that the carrying value may be impaired. Impairment is determined for goodwill by assessing the recoverable amount of each CGU (or group of CGUs) to which the goodwill relates. Where the recoverable amount of the CGU is less than their carrying amount, an impairment loss is recognized. Impairment losses relating to goodwill cannot be reversed in future years.

j. Investment in Associates Entities

An associate is an entity over which the Group has significant influence. Significant influence is the power to participate in the financial and policy decisions of the investee, but is not control or joint control over those policies.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

j. Investasi pada Entitas Asosiasi (lanjutan)

Ventura bersama adalah salah satu tipe pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset neto ventura bersama. Pengendalian bersama adalah persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian atas suatu pengaturan, yang ada hanya ketika keputusan mengenai aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian.

Pertimbangan yang dibuat dalam menentukan pengaruh signifikan adalah serupa dengan hal-hal yang diperlukan dalam menentukan kendali atas entitas anak.

Investasi Grup pada entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Dalam metode ekuitas, investasi awalnya diakui pada harga perolehan. Nilai tercatat investasi disesuaikan untuk mengakui perubahan bagian Grup atas aset neto entitas asosiasi sejak tanggal perolehan. *Goodwill* yang terkait dengan entitas asosiasi termasuk dalam jumlah tercatat investasi dan tidak diamortisasi maupun diuji secara individual untuk penurunan nilai.

Setelah tanggal perolehan, Grup melakukan penyesuaian yang diperlukan atas bagian Grup atas laba atau rugi entitas asosiasi. Penyesuaian ini mencakup depresiasi atas aset yang dapat disusutkan berdasarkan nilai wajar aset tersebut pada tanggal perolehan, serta pengakuan atas setiap rugi penurunan nilai yang berkaitan dengan *goodwill* atau aset tetap.

Laba rugi konsolidasian mencerminkan bagian dari Grup atas hasil operasi dari entitas asosiasi. Perubahan PKL dari entitas asosiasi disajikan sebagai bagian dari PKL Grup. Selain itu, bila terdapat perubahan yang diakui langsung pada ekuitas entitas asosiasi, Grup mengakui bagiannya atas perubahan, jika sesuai, dalam laporan perubahan ekuitas konsolidasian. Laba atau rugi yang belum direalisasi sebagai hasil dari transaksi-transaksi antara Grup dengan entitas asosiasi dieliminasi sesuai dengan kepentingan dalam entitas asosiasi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

j. Investment in Associates Entities (continued)

A joint venture is a type of joint arrangement whereby the parties that have joint control of the arrangement have rights to the net assets of the joint venture. Joint control is the contractually agreed sharing of control of an arrangement, which exists only when decisions about the relevant activities require the unanimous consent of the parties sharing control.

The considerations made in determining significant influence are similar to those necessary to determine control over subsidiaries.

The Group's investment in its associate is accounted for using the equity method. Under the equity method, the investment in an associate is initially recognized at cost. The carrying amount of the investment is adjusted to recognize changes in the Group's share of net assets of the associate since the acquisition date. Goodwill relating to the associate is included in the carrying amount of the investment and is neither amortized nor tested for impairment individually.

After the date of acquisition, the Group makes the necessary adjustments to its share of the associate's profit or loss. These adjustments include depreciation of the depreciable assets based on their fair values at the acquisition date and recognition of any impairment losses relating to a goodwill or fixed assets.

The consolidated profit or loss reflects the Group's share of the results of operations of the associate. Any change in OCI of the associate is presented as part of the Group's OCI. In addition, when there has been a change recognized directly in the equity of the associate, the Group recognizes its share of any changes, when applicable, in the consolidated statement of changes in equity. Unrealized gains and losses resulting from transactions between the Group and the associate are eliminated to the extent of the interest in the associate.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

j. Investasi pada Entitas Asosiasi (lanjutan)

Gabungan bagian Grup atas laba rugi entitas asosiasi disajikan pada muka laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian (sebagai laba atau rugi) di luar laba usaha dan mencerminkan laba atau rugi setelah pajak dan kepentingan nonpengendali pada entitas anak dari entitas asosiasi.

Laporan keuangan entitas asosiasi disusun atas periode pelaporan yang sama dengan Grup.

Setelah penerapan metode ekuitas, Grup menentukan apakah diperlukan untuk mengakui tambahan rugi penurunan nilai atas investasi Grup dalam entitas asosiasi. Grup menentukan pada setiap tanggal pelaporan apakah terdapat bukti yang objektif yang mengindikasikan bahwa investasi dalam entitas asosiasi mengalami penurunan nilai. Dalam hal ini, Grup menghitung jumlah penurunan nilai berdasarkan selisih antara jumlah terpulihkan atas investasi dalam entitas asosiasi dan nilai tercatatnya dan mengakuinya dalam laba rugi.

Pada saat kehilangan pengaruh signifikan atas entitas asosiasi, Grup mengukur dan mengakui bagian investasi tersisa pada nilai wajar. Selisih antara nilai tercatat entitas asosiasi dan nilai wajar investasi yang tersisa dan penerimaan dari pelepasan investasi diakui pada laba rugi.

k. Properti Investasi

Properti investasi merupakan properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau keduanya) yang dikuasai Grup untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk tujuan administratif atau dijual dalam kegiatan usaha.

Perusahaan telah memilih model biaya untuk mencatat properti investasinya.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

j. Investment in Associates (continued)

The aggregate of the Group's share of profit or loss of an associate is shown on the face of the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income (as profit or loss) outside operating profit and represents profit or loss after tax and NCI in the subsidiaries of the associate.

The financial statements of the associate are prepared for the same reporting period of the Group.

After application of the equity method, the Group determines whether it is necessary to recognize an additional impairment loss on the Group's investment in its associate. The Group determines at each reporting date whether there is any objective evidence that the investment in the associate is impaired. If this is the case, the Group calculates the amount of impairment as the difference between the recoverable amount of the investment in associate and its carrying value, and recognizes the amount in profit or loss.

Upon loss of significant influence over the associate, the Group measures and recognizes any retained investment at its fair value. Any difference between the carrying amount of the associate and the fair value of the retained investment and proceeds from disposal is recognized in profit or loss.

k. Investment Properties

Investment properties represents properties (land or building - or part of a building - or both) held by the Group to earn rental or for capital appreciation or both, rather than for use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes or sale in the ordinary course of business.

The Company has chosen the cost model to record for its investment properties.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

k. Properti Investasi (lanjutan)

Properti investasi dinyatakan sebesar biaya perolehan termasuk biaya transaksi dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, jika ada. Jumlah tercatat termasuk bagian biaya penggantian dari properti investasi yang ada pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan terpenuhi dan tidak termasuk biaya harian penggunaan properti investasi tersebut.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis properti investasi yang berupa bangunan fasilitas pelabuhan (10 - 50 tahun) dan jalan dan bangunan (5 - 45 tahun).

Properti investasi dihentikan pengakuannya ketika telah dilepaskan (yaitu, pada tanggal penerima memperoleh kendali) atau ketika tidak lagi digunakan secara permanen dan tidak ada manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari pelepasannya. Selisih antara hasil pelepasan neto dan jumlah tercatat aset diakui dalam laba rugi pada periode penghentian pengakuan. Dalam menentukan jumlah imbalan dari penghentian pengakuan properti investasi, Grup mempertimbangkan dampak dari imbalan variabel, keberadaan komponen pembiayaan yang signifikan, imbalan non-kas, dan imbalan yang harus dibayar kepada pembeli (jika ada).

Transfer dilakukan ke (atau dari) properti investasi hanya jika ada perubahan penggunaan. Untuk pengalihan dari properti investasi ke properti yang digunakan sendiri, biaya yang diperhitungkan untuk akuntansi selanjutnya adalah nilai wajar pada tanggal perubahan penggunaan. Jika properti yang digunakan sendiri menjadi properti investasi, Grup mencatat properti tersebut sesuai dengan kebijakan yang tercantum dalam aset tetap sampai dengan tanggal perubahan penggunaan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

k. Investment Properties (continued)

Investment properties are stated at cost including transaction cost less accumulated depreciation and any impairment in value, if any. The carrying amount includes the cost of replacement of an existing investment property in the year such costs are incurred, if the recognition criteria are met and does not include the cost of daily use of the investment property.

Depreciation is computed using the straight-line basis over the estimated useful lifes of investment properties which consist of building and port facilities (10 - 50 years) and road and building (5 - 45 years).

Investment properties are derecognized either when they have been disposed of (i.e., at the date the recipient obtains control) or when they are permanently withdrawn from use and no future economic benefit is expected from their disposal. The difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset is recognized in profit or loss in the period of derecognition. In determining the amount of consideration from the derecognition of investment property the Group considers the effects of variable consideration, existence of a significant financing component, non-cash consideration, and consideration payable to the buyer (if any).

Transfers are made to (or from) investment property only when there is a change in use. For a transfer from investment property to owner-occupied property, the deemed cost for subsequent accounting is the fair value at the date of change in use. If owner-occupied property becomes an investment property, the Group accounts for such property in accordance with the policy stated under property, plant and equipment up to the date of change in use.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

l. Aset Tetap

Seluruh aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan, yang terdiri atas harga perolehan dan biaya-biaya tambahan yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan.

Setelah pengakuan awal, aset ini dinyatakan pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai.

Penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya oleh Grup dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis.

Pada tahun 2025, Grup meninjau ulang estimasi umur manfaat aset berdasarkan hasil penilaian pihak ketiga. Adapun perubahan umur manfaat yang berlaku mulai tahun 2025 adalah sebagai berikut:

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

l. Fixed Assets

All fixed assets are initially recognized at cost, which comprises its purchase price and any costs directly attributable in bringing the asset to its working condition and to the location where it is intended to be used.

Subsequent to initial recognition, these assets are carried at cost less any subsequent accumulated depreciation and impairment losses.

Depreciation of an asset is commenced when the asset is available for use in the manner intended by the Group and is computed using the straight-line method based on the estimated useful lives of the assets.

In 2025, the Group reviewed the estimate useful lives of assets. This change was based on an assessment conducted by third party specialists. The revised useful lives effective in 2025 are as follows:

	Tahun/*Years*		
Jenis Aset	**2025**	**2024**	***Type of Assets***
Bangunan fasilitas pelabuhan	10 - 75	2 - 50	*Building and port facilities*
Kapal	10 - 20	4 - 20	*Vessels*
Alat fasilitas pelabuhan	4 - 30	2 - 20	*Port facility equipment*
Instalasi fasilitas pelabuhan	5 - 40	2 - 50	*Port facility installation*
Jalan dan bangunan	5 - 50	2 - 50	*Roads and building*
Peralatan	4 - 15	3 - 25	*Equipment*
Kendaraan	5 - 10	4 - 5	*Vehicles*
Emplasemen	3 - 30	3 - 50	*Emplacement*

Perubahan umur manfaat tersebut, yang berdampak pada perhitungan beban depresiasi, diterapkan secara prospektif mulai tahun 2025. Dampak dari perubahan tersebut diungkapkan pada Catatan 14.

Jumlah tercatat aset ini direviu atas penurunan nilai jika terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa jumlah tercatat mungkin tidak dapat seluruhnya terealisasi.

These changes in useful lives, which affect the calculation of depreciation are applied prospectively starting in 2025. The impact of such changes is disclosed in Note 14.

The carrying amounts of these assets are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that their carrying values may not be fully recoverable.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

l. Aset Tetap (lanjutan)

Jumlah tercatat komponen dari suatu aset dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat sudah tidak ada lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan maupun pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut (ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto dan jumlah tercatatnya) dimasukkan ke dalam laba rugi pada tahun penghentian pengakuan tersebut dilakukan.

Nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan aset tetap dievaluasi setiap akhir tahun pelaporan dan disesuaikan secara prospektif jika dipandang perlu.

Aset tetap dalam penyelesaian dicatat sebesar biaya perolehan, yang mencakup kapitalisasi beban pinjaman dan biaya-biaya lainnya yang terjadi sehubungan dengan pendanaan aset tetap dalam penyelesaian tersebut. Akumulasi biaya perolehan akan direklasifikasi ke akun "Aset Tetap" yang bersangkutan pada saat aset tetap tersebut telah selesai dikerjakan dan siap untuk digunakan. Aset tetap dalam penyelesaian tidak disusutkan sampai memenuhi syarat pengakuan sebagai aset tetap seperti diungkapkan di atas.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Beban pemeliharaan dan perbaikan dalam jumlah besar dikapitalisasi kepada jumlah tercatat aset terkait bila besar kemungkinan bagi Grup manfaat ekonomi masa depan menjadi lebih besar dari standar kinerja awal yang ditetapkan sebelumnya dan disusutkan sepanjang sisa masa manfaat aset terkait.

Tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

l. Fixed Assets (continued)

The carrying amount of an item of these assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising from the derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is directly included in the profit or loss of year the item is derecognized.

The residual values, useful lives and depreciation method of fixed assets are reviewed at the end of each reporting year and adjusted prospectively, if necessary.

Constructions in-progress are stated at cost, including capitalized borrowing costs and other charges incurred in connection with the financing of the said asset constructions. The accumulated costs will be reclassified to the appropriate "Fixed Assets" account when the construction is completed. Assets under construction are not depreciated until they fulfill criteria for recognition as fixed assets as disclosed above.

Repairs and maintenance expenses are taken to the profit or loss when they are incurred. The cost of major repairs and maintenance is included in the carrying amount of the related asset when it is probable that future economic benefits in excess of the originally assessed standard of performance of the existing asset will flow to the Group and is depreciated over the remaining useful life of the related asset.

Land is stated at cost and not depreciated.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

l. Aset Tetap (lanjutan)

Jika biaya perolehan tanah termasuk biaya pembongkaran, pemindahan dan restorasi lokasi serta manfaat yang diperoleh dari pembongkaran, pemindahan dan pemugaran tersebut terbatas, maka biaya tersebut disusutkan selama periode manfaat yang diperolehnya. Dalam beberapa kasus, tanah itu sendiri memiliki umur manfaat yang terbatas, dalam hal ini disusutkan dengan cara yang mencerminkan manfaat yang diperoleh dari tanah tersebut.

Suku cadang utama dan peralatan siap pakai diklasifikasikan sebagai aset tetap bila diperkirakan akan digunakan dalam operasi selama lebih dari satu tahun.

Aset kerja sama operasi merupakan kegiatan kerja sama yang meliputi pemanfaatan aset dari para pihak atas suatu kegiatan operasi yang didasarkan pada perjanjian kontraktual. Aset kerja sama operasi dinyatakan berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan aset tetap.

m. Sewa

Grup menilai pada saat insepsi kontrak apabila kontrak tersebut adalah, atau mengandung, sewa. Yaitu, bila kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Grup sebagai Penyewa

Grup menerapkan pendekatan pengakuan dan pengukuran tunggal untuk semua sewa, kecuali untuk sewa jangka-pendek dan sewa yang aset pendasarnya bernilai-rendah. Grup mengakui liabilitas sewa untuk melakukan pembayaran sewa dan aset hak-guna yang mewakili hak untuk menggunakan aset pendasar.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

l. Fixed Assets (continued)

If the cost of land includes the costs of site dismantlement, removal and restoration and the benefits from the site dismantlement, removal and restoration is limited, that portion of the land asset is depreciated over the period of benefits obtained by incurring those costs. In some cases, the land itself may have a limited useful life, in which case it is depreciated in a manner that reflects the benefits to be derived from it.

Major spare parts and stand-by equipments are classified as fixed assets when they are expected to be used in operations during more than one year.

Joint operation assets are joint activities that include utilization of the assets from the parties for operational activities that is based on contractual agreements. Joint operation assets are stated at cost less accumulated depreciation and are depreciated using the straight-line method over the estimated useful lifes of similar fixed assets.

m. Leases

The Group assesses at contract inception whether a contract is, or contains, a lease. That is, if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

The Group as Lessee

The Group applies a single recognition and measurement approach for all leases, except for short-term leases and leases of low-value assets. The Group recognizes lease liabilities to make lease payments and right-of-use assets representing the right to use the underlying assets.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

m. Sewa (lanjutan)

Aset hak-guna

Grup mengakui aset hak-guna pada tanggal permulaan sewa (yaitu tanggal aset pendasar tersedia untuk digunakan). Aset hak-guna diukur pada harga perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, serta disesuaikan dengan pengukuran kembali liabilitas sewa. Biaya perolehan aset hak-guna mencakup jumlah liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung awal yang terjadi, dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan dikurangi setiap insentif sewa yang diterima. Aset hak-guna disusutkan dengan metode garis lurus selama masa sewa.

Jika kepemilikan aset pendasar sewa beralih ke Grup pada akhir masa sewa atau biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Grup akan mengeksekusi opsi beli, maka penyusutan aset hak-guna dihitung menggunakan estimasi masa manfaat aset. Aset hak-guna juga dievaluasi untuk penurunan nilai (Catatan 2i).

Liabilitas sewa

Pada tanggal permulaan sewa, Grup mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang harus dilakukan selama masa sewa.

Pembayaran sewa juga mencakup harga pelaksanaan dari opsi beli yang secara wajar pasti dilaksanakan oleh Grup dan pembayaran pinalti untuk mengakhiri sewa, jika masa sewa merefleksikan adanya opsi dapat mengakhiri sewa. Pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau tarif diakui sebagai beban pada periode terjadinya peristiwa atau kondisi yang memicu terjadinya pembayaran tersebut.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

m. Leases (continued)

Right-of-use assets

The Group recognizes right-of-use assets at the commencement date of the lease (i.e., the date the underlying asset is available for use). Right-of-use assets are measured at cost, less any accumulated depreciation and impairment losses, and adjusted for any remeasurement of lease liabilities. The cost of right-of-use assets includes the amount of lease liabilities recognized, initial direct costs incurred, and lease payments made at or before the commencement date less any lease incentives received. Right-of-use assets are depreciated on a straight-line basis over the lease term.

If ownership of the leased asset transfers to the Group at the end of the lease term or the cost reflects the exercise of a purchase option, depreciation is calculated using the estimated useful life of the asset.The right-of-use assets are also assessed for impairment (Note 2i).

Lease liabilities

At the commencement date of the lease, the Group recognizes lease liabilities measured at the present value of lease payments to be made over the lease term.

The lease payments also include the exercise price of a purchase option reasonably certain to be exercised by the Group and payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects exercising the option to terminate. Variable lease payments that do not depend on an index or a rate are recognized as expenses in the period in which the event or condition that triggers the payment occurs.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

m. Sewa (lanjutan)

Liabilitas sewa (lanjutan)

Dalam menghitung nilai kini pembayaran sewa, Grup menggunakan Suku Bunga Pinjaman Inkremental ("SBPI") pada tanggal permulaan sewa karena suku bunga implisit dalam sewa tidak dapat langsung ditentukan. Setelah tanggal permulaan, jumlah kewajiban sewa ditingkatkan untuk mencerminkan akresi bunga (atas efek diskonto) dan dikurangi untuk pembayaran sewa yang dilakukan. Selain itu, nilai tercatat liabilitas sewa diukur kembali jika terdapat modifikasi, perubahan masa sewa, perubahan pembayaran sewa, atau perubahan penilaian atas opsi untuk membeli aset pendasar.

Sewa jangka pendek dan sewa dengan aset bernilai rendah

Grup menerapkan pengecualian pengakuan sewa jangka pendek untuk sewa yang jangka waktu sewanya pendek (yaitu, sewa yang memiliki jangka waktu sewa 12 bulan atau kurang dari tanggal permulaan dan tidak memiliki opsi beli). Grup juga menerapkan pengecualian pengakuan sewa dengan aset bernilai rendah untuk sewa yang aset pendasarnya dianggap bernilai rendah. Pembayaran sewa untuk sewa jangka pendek dan sewa dari aset bernilai rendah diakui sebagai beban dengan metode garis lurus selama masa sewa.

Grup sebagai Pesewa

Sewa yang dalam pengaturannya Grup tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pendapatan sewa yang timbul dicatat dengan metode garis lurus selama masa sewa dan diakui sebagai bagian dari pendapatan usaha pada laba rugi karena sifatnya. Biaya langsung awal yang terjadi dalam negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat dari aset sewaan dan diakui selama masa sewa atas dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Sewa kontijensi diakui sebagai pendapatan pada periode dimana sewa kontijensi tersebut diperoleh.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

m. Lease (continued)

Lease liabilities (continued)

In calculating the present value of lease payments, the Group uses its Incremental Borrowing Rate ("IBR") at the lease commencement date because the interest rate implicit in the lease is not readily determinable. After the commencement date, the amount of lease liabilities is increased to reflect the accretion of interest and reduced for the lease payments made. In addition, the carrying amount of lease liabilities is remeasured if there is a modification, a change in the lease term, a change in the lease payments or a change in the assessment of an option to purchase the underlying asset.

Short-term leases and leases of low-value assets

The Group applies the short-term lease recognition exemption to its short-term leases (i.e., those leases that have a lease term of 12 months or less from the commencement date and do not contain a purchase option). The Group also applies the lease of low-value assets recognition exemption to leases that are considered to be low value. Lease payments on short-term leases and leases of low-value underlying assets are recognized as expense on a straight-line basis over the lease term.

The Group as Lessor

Leases in which the Group does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership of an asset are classified as operating leases. Lease income arising is accounted for on a straight-line basis over the lease terms and is included in other operating income in the profit or loss due to its operating nature. Initial direct costs incurred in negotiating and arranging an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognized over the lease term on the same basis as lease income. Contingent rent are recognized as revenue in the period in which they are earned.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

n. Pengaturan Bersama

Grup merupakan pihak dalam pengaturan bersama apabila terdapat pengaturan kontraktual yang memberikan pengendalian bersama atas aktivitas relevan kepada Grup dan minimal satu pihak lainnya. Pengendalian bersama diuji dengan prinsip yang sama dengan penilaian pengendalian atas anak perusahaan.

Grup mengklasifikasikan kepentingannya dalam pengaturan bersama sebagai berikut:
- Ventura bersama: ketika Grup memiliki hak hanya pada aset neto dari pengaturan bersama
- Operasi bersama: ketika Grup memiliki hak atas aset dan kewajiban atas liabilitas yang terkait dengan pengaturan bersama.

Dalam melakukan penilaian klasifikasi kepentingan dalam pengaturan bersama, Grup mempertimbangkan hal-hal berikut:
- struktur pengaturan bersama
- bentuk hukum pengaturan bersama apabila dibentuk melalui kendaraan terpisah
- persyaratan pengaturan kontraktual
- ketika relevan, fakta dan keadaan lain (termasuk semua perjanjian kontraktual lainnya).

Grup mencatat kepentingannya dalam operasi bersama dengan mengakui hak atas aset, kewajiban atas liabilitas, pendapatan dan beban sesuai dengan ketentuan hak dan kewajiban dalam ketentuan kontraktual.

o. Aset Takberwujud

Aset takberwujud Grup terdiri dari aset hak konsesi, piranti lunak dan biaya ditangguhkan.

Aset takberwujud diakui jika Grup kemungkinan besar akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset takberwujud tersebut dan biaya aset tersebut dapat diukur dengan andal.

Aset takberwujud diukur sebesar nilai perolehan pada pengakuan awal. Setelah pengakuan awal, aset takberwujud dicatat pada nilai perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan penurunan nilai, jika ada.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

n. Joint Arrangements

The Group is a party to a joint arrangement when there is a contractual arrangement that confers joint control over the relevant activities of the arrangement to the Group and at least one other party. Joint control is assessed under the same principles as control over subsidiaries.

The Group classifies its interests in joint arrangements as either:
- *Joint ventures: where the Group has rights to only the net assets of the joint arrangement*
- *Joint operations: where the Group has both the rights to assets and obligations for the liabilities of the joint arrangement.*

In assessing the classification of interests in joint arrangements, the Group considers:
- *the structure of the joint arrangement*
- *the legal form of joint arrangements structured through a separate vehicle*
- *the contractual terms of the joint arrangement agreement*
- *any other facts and circumstances (including any other contractual arrangements).*

The Group accounts for its interests joint operations by recognising its share of assets, liabilities, revenues and expenses in accordance with its contractually conferred rights and obligations.

o. Intangible Assets

Intangible assets of the Group consist of concession rights asset, software and deferred charges.

Intagible assets are recognized if the Group will obtain useful economic benefit from the intangible assets and the cost of assets can be reliably measured.

Intangible asset is measured on initial recognition at cost. Following initial recognition, the intangible asset is carried at cost less any accumulated amortization and impairment loss, if any.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

o. Aset Takberwujud (lanjutan)

Aset takberwujud diamortisasi selama umur manfaat ekonomi aset dan dinilai penurunan nilainya setiap kali terdapat indikasi bahwa aset tidak berwujud mungkin mengalami penurunan nilai. Periode amortisasi dan metode amortisasi untuk aset tidak berwujud dengan masa manfaat terbatas ditelaah setidaknya pada setiap akhir periode pelaporan.

Aset takberwujud dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan (yaitu, pada tanggal penerima memperoleh kendali) atau ketika tidak ada manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara hasil pelepasan neto dan jumlah tercatat aset) dimasukkan dalam laporan laba rugi.

Aset Hak Konsesi

Grup telah menerapkan ISAK 112, "Perjanjian Konsesi Jasa" dan ISAK 229, "Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan".

ISAK 112 mengatur prinsip umum dalam pengakuan dan pengukuran hak dan kewajiban terkait dengan perjanjian konsesi jasa. ISAK 112 mengatur bahwa infrastruktur tidak diakui sebagai aset tetap operator (pihak penerima konsesi jasa) karena perjanjian jasa kontraktual tidak memberikan hak kepada operator untuk mengendalikan penggunaan infrastruktur jasa publik. Operator memiliki akses untuk mengoperasikan infrastruktur dalam menyediakan jasa publik untuk kepentingan pemberi konsesi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam kontrak.

ISAK 229 memberikan panduan spesifik mengenai pengungkapan yang diperlukan atas perjanjian konsesi jasa.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

o. Intangible Assets (continued)

An intangible asset is amortized over the asset's useful economic life and assessed for impairment whenever there is an indication that the intangible asset may be impaired. The amortisation period and the amortisation method for an intangible asset with a finite useful life are reviewed at least at the end of each reporting period.

An intangible asset is derecognized upon disposal (i.e., at the date the recipient obtains control) or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising upon derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in the statement of profit or loss.

Concession Rights Assets

The Group has adopted ISAK 112, "Service Concession Arrangement" (ISAK 112) and ISAK 229, "Service Concession Arrangement: Disclosure".

ISAK 112 determines the general principles in the recognition and measurement of liabilities and rights related to service concession arrangement. ISAK 112 regulates that an operator (concession right beneficiary) does not recognize any infrastructure assets because the contractual service arrangement does not convey the right to control the use of the public service infrastructure to the operator. The operator has access to operate the infrastructure to provide the public service on behalf of the grantor in accordance with the terms specified in the contract.

ISAK 229 provides specific guidance for the required disclosures regarding the service concession arrangement.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

o. Aset Takberwujud (lanjutan)

Aset Hak Konsesi (lanjutan)

Grup membukukan perjanjian konsesi jasa sebagai model aset takberwujud karena memiliki hak (lisensi) untuk membebankan pengguna jasa publik. Pada saat pengakuan awal, aset konsesi dicatat pada nilai wajar dari imbalan yang diterima atau akan diterima. Aset konsesi ini adalah aset hak pengelolaan terminal pelabuhan dan alur pelayaran yang akan diamortisasi selama sisa masa hak konsesi sejak tanggal pengoperasian terminal pelabuhan dan alur pelayaran. Selama masa konstruksi, akumulasi biaya perolehan dan konstruksi terminal pelabuhan dan alur pelayaran diakui sebagai aset konsesi dalam penyelesaian. Amortisasi mulai dibebankan pada saat aset konsesi tersebut siap digunakan.

Aset konsesi akan dihentikan pengakuannya pada saat berakhirnya masa konsesi. Tidak akan ada keuntungan atau kerugian saat penghentian pengakuan karena aset konsesi diharapkan telah diamortisasi secara penuh, akan diserahkan kepada Kantor Otoritas Pelabuhan ("OP") tanpa syarat.

Aset konsesi yang diberikan kepada Grup dapat dipindahkan dengan persetujuan Pemerintah/OP. Aset konsesi ini akan diserahkan ke Pemerintah/OP pada saat akhir masa konsesi dan, pada saat itu, seluruh akun yang berhubungan dengan aset konsesi akan dihentikan pengakuannya.

Selain itu, Grup mengakui dan mengukur pendapatan konstruksi sesuai dengan PSAK 115: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, untuk jasa yang dilakukannya. Ketika Grup menyediakan jasa konstruksi atau peningkatan kemampuan, imbalan yang diterima atau akan diterima oleh Grup diakui pada nilai wajar.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

o. Intangible Assets (continued)

Concession Rights Assets (continued)

The Group records for its service concession arrangement under the intangible asset model as it receives the right (license) to charge users of public service. At initial recognition, concession assets are recorded at the fair value of the benefit received or to be received. These concession assets are port terminal and shipping channel concession rights which are amortized over the remaining concession period from the date of operation of the port terminal and shipping channel. During the construction period, the accumulated port terminal and shipping channel construction cost is recognized as concession assets in progress. The amortization of the cost starts when the concession assets are ready to be operated.

The concession assets are derecognized at the end of the concession period. There will be no gain or loss upon derecognition as the concession assets which are expected to be fully amortized by then, will be handed over to the Kantor Otoritas Pelabuhan ("OP") for no consideration.

Concession asset which granted to the Group are transferrable with approval from the Government/OP. These concession assets will be transferred to the Government/OP at the end of the concession period and, at such time, all accounts related to the concession rights assets will be derecognized.

In addition, the Group recognizes and measures construction revenue in accordance with PSAK 115: Revenue from Contracts with Customers, for the services it performs. When the Group provides construction services or upgrades services, the consideration received or to be received by the Group is recognized at its fair value.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

o. Aset Takberwujud (lanjutan)

Aset Hak Konsesi (lanjutan)

Kontrak konstruksi meliputi seluruh biaya konstruksi pembangunan aset konsesi - terminal pelabuhan dan alur pelayaran yang meliputi biaya pembangunan dermaga, pengadaan tanah dan biaya-biaya lain yang berhubungan langsung dengan pembangunan tersebut, termasuk biaya pembangunan jalan akses dan fasilitas lainnya yang disyaratkan, ditambah biaya pinjaman yang secara langsung digunakan untuk mendanai proses pembangunan aset tersebut. Biaya pinjaman dikapitalisasi sampai dengan saat proses pembangunan tersebut selesai dan dioperasikan.

Grup mengakui biaya jasa konstruksi dan peningkatan kemampuan aset konsesi sebagai aset takberwujud dimana Grup menerima hak (lisensi) untuk membebankan pengguna jasa publik. Suatu hak untuk membebankan pengguna jasa publik bukan merupakan hak tanpa syarat untuk menerima kas karena jumlahnya bergantung pada sejauh mana publik menggunakan jasa.

Imbalan yang diberikan oleh pemberi konsesi kepada Grup selama periode konstruksi atau peningkatan kemampuan diklasifikasikan sebagai aset kontrak konsesi sesuai PSAK 115: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan (Catatan 17).

Biaya konstruksi merupakan nilai dari jumlah perolehan kontrak konstruksi.

Aset konsesi diamortisasi selama masa konsesi dengan menggunakan metode garis lurus.

Provisi Pemeliharaan Terminal

Dalam pengoperasian terminal, Grup mempunyai kewajiban untuk menyerahkan aset pada akhir masa konsesi kepada OP dalam kondisi baik, antara lain dengan melakukan pemeliharaan secara berkala. Provisi pemeliharaan terminal diukur dengan nilai kini atas estimasi manajemen terhadap pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan liabilitas kini.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

o. Intangible Assets (continued)

Concession Rights Assets (continued)

Construction contract comprehends all cost directly attributable to the construction of concession assets - port terminal and shipping channel which includes cost of port development, land acquisition and other costs directly related to the development, including the cost of construction of access roads and other facilities required, plus the cost of borrowing directly used for financing the construction of concession asset. Borrowing costs are capitalized until the construction is completed and operated.

The Group recognizes construction services and increased capacity of concession asset as intangible assets which the Group receives the rights (license) to charge users of public services. A right to charge users of public services is not an unconditional right to receive cash because the amounts depend on the extent of public using the service.

The consideration received by the Group from the grantor during construction period or upgraded services are classified as concession contractual assets in accordance with PSAK 115: Revenue from Contracts with Customers (Note 17).

Construction cost is the value of the construction contract.

The concession assets are amortized over the concession period using straight line method.

Provision for Terminal Maintenance

In operating terminal, the Group has the obligation to transfer assets to OP at the end of concession period in good condition, among others by performing regular maintenance. The estimated net provision for terminal maintenance is discounted to its present value that reflects current provision.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

o. Aset Takberwujud (lanjutan)

Piranti lunak

Piranti lunak merupakan biaya-biaya sehubungan dengan perolehan sistem perangkat lunak yang mempunyai masa manfaat 4-5 tahun, ditangguhkan dan diamortisasi selama masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

p. Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman terdiri dari beban bunga dan biaya lain yang ditanggung Grup sehubungan dengan peminjaman dana. Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan, pembangunan atau pembuatan aset kualifikasian dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadi Grup.

Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai pada saat aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya dan pengeluaran untuk aset kualifikasian dan biaya pinjamannya telah terjadi. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan pada saat selesainya secara substansi seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan sesuai maksudnya.

q. Liabilitas Kontrak

Liabilitas kontrak atas pemakaian lahan dan bangunan diamortisasi selama masa kontrak pemakaian dengan menggunakan metode garis lurus. Bagian tidak lancar atas liabilitas kontrak disajikan sebagai bagian dari "liabilitas jangka panjang" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

o. Intangible Assets (continued)

Software

Software represents expenses relating to systems software cost, which benefits extend over a period of 4-5 years, are deferred and amortized over the periods benefited using the straight-line method.

p. Borrowing Cost

Borrowing costs consist of interest expenses and other financing charges that the Group incurs in connection with the borrowing funds. Borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset are capitalized as part of the cost of the related asset. All other borrowing costs are recognized as expenses when incurred.

Capitalization of borrowing costs commences when the activities to prepare the qualifying asset for its intended use are in progress and the expenditures for the qualifying asset and the borrowing costs have been incurred. Capitalization of borrowing costs ceases when substantially all the activities necessary to prepare the qualifying assets are completed for their intended use.

q. Contract Liabilities

Contract liabilities from usage of land and buildings are amortized over the usage term using the straight-line method. The non-current portion of contract liabilities is shown as part of "long term liabilities" in the consolidated statements of financial position.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

r. Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan dan Pengakuan Beban

Grup mengadopsi PSAK 115 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan" dengan menetapkan kerangka kerja yang komprehensif untuk menentukan bagaimana, kapan, dan berapa banyak pendapatan yang harus diakui. Standar ini menyediakan model lima langkah (*5-steps model*) tunggal berbasis prinsip untuk penentuan dan pengakuan pendapatan untuk diterapkan pada semua kontrak dengan pelanggan, sebagai berikut:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan;
2. Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Grup membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak;
3. Menetapkan harga transaksi, setelah dikurangi diskon, retur, insentif penjualan dan pajak pertambahan nilai, yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan di kontrak;
4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin;
5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

r. Revenue from Contracts with Customers and Recognition of Expenses

The Group adopted PSAK 115 "Revenue from Contracts with Customers" by providing a comprehensive framework for determining how, when and how much revenue should be recognized. This standard provides a principle-based, single 5-step model for revenue determination and recognition to be applied to all contracts with customers, as follows:

1. *Identify contract(s) with a customer;*
2. *Determine the transaction price. Transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer. If the consideration promised in a contract includes a variable amount, the Group estimates the amount of consideration to which it expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer less the estimated amount of service level guarantee which will be paid during the contract period;*
3. *Determine the transaction price, net of discounts, returns, sales incentives and value added tax, which an entity expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer;*
4. *Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct goods or services promised in the contract. When these are not directly observable, the relative standalone selling price are estimated based on expected cost plus margin;*
5. *Recognize revenue when performance obligation is satisfied by transferring a promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control of those goods or services).*

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

r. Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan dan Pengakuan Beban (lanjutan)

Selain itu, dalam mengadopsi PSAK 115, Grup juga memilih untuk menerapkan panduan praktis untuk tidak memperhitungkan dampak komponen pembiayaan ketika periode antara pembayaran untuk barang atau jasa yang dijanjikan dan pengalihan untuk barang atau layanan tersebut kepada pelanggan kurang dari satu tahun.

Di bawah ini adalah ringkasan kebijakan akuntansi pengakuan pendapatan Grup untuk pendapatan pelayanan terminal petikemas, pengusahaan tanah, bangunan, air dan listrik, pelayanan jasa terminal, pelayanan jasa kapal, jasa logistik, pelayanan kesehatan, pendapatan pas pelabuhan, pengusahaan peralatan, pelayanan jaringan dan konsultasi sistem informasi, pelayanan jasa barang, jasa keuangan, pengusahaan tol dan pendapatan jasa lain-lain.

Pendapatan dari pemberian jasa diakui pada saat terjadinya penyerahan jasa kepada pengguna. Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Grup dan jumlahnya dapat diukur secara handal tanpa memperhitungkan kapan pembayaran dilakukan. Pendapatan jasa diakui pada saat jasa telah selesai dilakukan dan berita acara diterbitkan.

Grup menilai pengaturan pendapatannya terhadap kriteria tertentu untuk menentukan apakah ia bertindak sebagai prinsipal atau agen. Grup bertindak sebagai prinsipal jika menanggung dampak manfaat dan risiko signifikan terkait dengan penjualan barang dan jasa.

Grup telah melakukan analisa atas transaksi penjualan dan menyimpulkan bahwa Grup bertindak sebagai prinsipal pada semua perjanjian pendapatan.

Pada tanggal pelaporan, pendapatan yang sudah diakui namun belum ditagihkan dicatat sebagai "piutang usaha belum difakturkan" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

r. Revenue from Contracts with Customers and Recognition of Expenses (continued)

In addition, in adopting PSAK 115, the Group has also chosen to apply practical guidance not to take into account the impact of the financing component when the period between payment for the goods or services promised and the transfer for the goods or services to the customer is less than one year.

Below is a summary of the Group's revenue recognition accounting policies for revenue from container services, land, building, water and electricity, terminal services, vessel services, logistic services, medical services, port entry fee, equipment services, network services and consultant of information system, cargo services, financial services, toll services and other services.

Revenue from service provision is recognized when the service is rendered to the user. Revenue is recognized when it is probable that economic benefits will be obtained by the Group and the amount can be measured reliably regardless of when the payment is made. Service revenues are recognized when the services are completed and the minutes are issued.

The Group assesses its revenue arrangements against certain criteria to determine whether it is acting as principal or agent. The Group acts as the principal if it bears the impact of significant benefits and risks associated with the sale of goods and services.

The Group has analyzed the sales transaction and concluded that the Group acts as the principal in all revenue agreements.

At reporting date, revenues earned but not yet billed to customer are recorded as "unbilled receivable" in the consolidated statement of financial position.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

r. Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan dan Pengakuan Beban (lanjutan)

Penghasilan Sewa

Penghasilan sewa diakui dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Pengakuan Beban

Beban diakui pada saat terjadinya (asas akrual).

s. Perpajakan

Pajak Final

Sesuai peraturan perpajakan di Indonesia, pajak final dikenakan atas nilai bruto transaksi, dan tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian.

Pajak final tidak termasuk dalam lingkup yang diatur oleh PSAK 212: Pajak Penghasilan.

Pajak Penghasilan Kini

Aset dan liabilitas pajak kini untuk periode berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan. Tarif pajak dan peraturan pajak yang digunakan untuk menghitung jumlah tersebut adalah yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan di negara tempat Grup beroperasi dan menghasilkan pendapatan kena pajak.

Bunga dan denda disajikan sebagai bagian dari penghasilan atau beban operasi lain karena tidak dianggap sebagai bagian dari beban pajak penghasilan.

Pajak penghasilan kini terkait dengan pos-pos yang diakui secara langsung di ekuitas diakui dalam ekuitas dan bukan dalam laporan laba rugi. Manajemen secara berkala mengevaluasi posisi yang diambil dalam Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") sehubungan dengan situasi di mana peraturan perpajakan yang berlaku tunduk pada interpretasi dan menetapkan ketentuan yang sesuai.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

r. Revenue from Contracts with Customers and Recognition of Expenses (continued)

Lease Income

Lease income is recognized on a straight-line basis over the lease terms.

Expenses Recognition

Expenses are recognized when they are incurred (accrual basis).

s. Taxation

Final Tax

In accordance with the tax regulation in Indonesia, final tax is applied to the gross value of transactions, even when the parties carrying the transaction recognizing losses.

Final tax is scoped out from PSAK 212: Income Tax.

Current Income Tax

Current income tax assets and liabilities for the current period are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the taxation authority. The tax rates and tax laws used to compute the amount are those that have been enacted or substantively enacted as at the reporting date in the countries where the Group operates and generates taxable income.

Interests and penalties are presented as part of other operating income or expenses since they are not considered as part of the income tax expense.

Current income tax relating to items recognized directly in equity is recognized in equity and not in the statement of profit or loss. Management periodically evaluates positions taken in the tax returns with respect to situations in which applicable tax regulations are subject to interpretation and establishes provisions where appropriate.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

s. Perpajakan (lanjutan)

Pajak Penghasilan Kini (lanjutan)

Kekurangan/kelebihan pembayaran pajak penghasilan dicatat sebagai bagian dari "Pajak Penghasilan Badan - Kini" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Grup juga menyajikan bunga/denda, jika ada, sebagai bagian dari "Pajak Penghasilan Badan - Kini".

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima atau, jika diajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan ditetapkan.

Sebagai tanggapan terhadap penerapan kerangka Pilar Dua Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (*Organisation for Economic Co-operation and Development* atau "OECD"), pada tanggal 31 Desember 2024, Pemerintah Indonesia menerapkan kerangka Pilar Dua melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 136/2024 (PMK 136/2024). Aturan model Pilar Dua sebagaimana diterapkan dalam PMK 136/2024 akan berlaku untuk tahun fiskal yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025. Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025, Grup telah menerapkan amandemen PSAK 212: Pajak Penghasilan, yang memberikan pengecualian wajib sementara dari pengakuan atau pengungkapan pajak tangguhan terkait Pilar Dua. Pada tahun yang berakhir 31 Desember 2025, Grup tidak memenuhi kriteria sebagaimana penerapan dalam PMK 136/2024 terkait dengan Pilar Dua.

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer pada tanggal pelaporan antara dasar pengenaan pajak dari aset dan liabilitas dan jumlah tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan pada tanggal pelaporan.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang kena pajak, kecuali:

i) liabilitas pajak tangguhan yang terjadi dari pengakuan awal *goodwill* atau dari aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan transaksi kombinasi bisnis, dan pada waktu transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi dan laba kena pajak/rugi pajak;

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

s. Taxation (continued)

Current Income Tax (continued)

Underpayment/overpayment of income tax are presented as part of "Corporate Income Tax - Current" in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income. The Group also presented interest/penalty, if any, as part of "Corporate Income Tax - Current".

Amendments to tax obligations are recorded when a tax assessment letter is received or, if filed an objection, when the result of the objection is determined.

In response to the implementation of the Organisation for Economic Co-operation and Development ("OECD") Pillar Two framework, on December 31, 2024, Indonesian Government implemented Pillar Two framework through Ministry of Finance Regulation No. 136/2024 (PMK 136/2024). The Pillar Two model rules as implemented under PMK 136/2024 will take effect for fiscal years beginning on or after January 1, 2025. For the year ended December 31, 2025, the Group has applied amendments to PSAK 212: Income Taxes, which provide mandatory temporary exception from recognizing or disclosing deferred taxes related to Pillar Two. For the year ended December 31, 2025, the Group did not meet the criteria as applied in PMK 136/2024 related to Pillar Two.

Deferred Tax

Deferred tax is provided using the liability method on temporary differences at the reporting date between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes at the reporting date.

Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences, except:

i) where the deferred tax liability arises from the initial recognition of goodwill or of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and, at the time of the transaction, affects neither the accounting profit nor taxable profit or loss;

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

s. Perpajakan (lanjutan)

Pajak Tangguhan (lanjutan)

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang kena pajak, kecuali: (lanjutan)

ii) dari perbedaan temporer kena pajak atas investasi pada entitas anak, yang saat pembalikannya dapat dikendalikan dan besar kemungkinannya bahwa beda temporer itu tidak akan dibalik dalam waktu dekat.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan akumulasi rugi pajak belum dikompensasi, bila kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dikurangkan tersebut, dan rugi pajak belum dikompensasi, dapat dimanfaatkan, kecuali:

i) jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau liabilitas dalam transaksi yang bukan transaksi kombinasi bisnis dan tidak mempengaruhi laba akuntansi maupun laba kena pajak/rugi pajak; atau

ii) dari perbedaan temporer yang dapat dikurangkan atas investasi pada entitas anak, aset pajak tangguhan hanya diakui bila besar kemungkinannya bahwa beda temporer itu tidak akan dibalik dalam waktu dekat dan laba kena pajak dapat dikompensasi dengan beda temporer tersebut.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan diturunkan apabila laba kena pajak mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang tidak diakui ditinjau ulang pada setiap tanggal pelaporan dan akan diakui apabila besar kemungkinan bahwa laba kena pajak pada masa yang akan datang akan tersedia untuk pemulihannya.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diperkirakan akan berlaku pada tahun saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak dan peraturan pajak yang telah berlaku atau yang secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

s. Taxation (continued)

Deferred Tax (continued)

Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences, except: (continued)

ii) in respect of taxable temporary differences associated with investments in subsidiaries, when the timing of the reversal of the temporary differences can be controlled and it is probable that the temporary differences will not reverse in the foreseeable future.

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and carry forward of unused tax losses, to the extent that it is probable that taxable profits will be available against which deductible temporary differences, and the carry forward of unused tax losses can be utilized, except:

i) where the deferred tax asset relating to the deductible temporary difference arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and, at the time of the transaction, affects neither the accounting profit nor taxable profit or loss; or

ii) in respect of deductible temporary differences associated with investments in subsidiaries, deferred tax assets are recognized only to the extent that it is probable that the temporary differences will reverse in the foreseeable future and taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilized.

The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the benefit of that deferred tax asset to be utilized. Unrecognized deferred tax assets are reassessed at each reporting date and are recognized to the extent that it has become probable that future taxable profit will allow the deferred tax assets to be recovered.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the year when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted as at the reporting date.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

s. Perpajakan (lanjutan)

Pajak Tangguhan (lanjutan)

Pajak tangguhan terkait dengan pos-pos yang diakui di luar laba rugi diakui di luar laba rugi. Item pajak tangguhan diakui sesuai dengan transaksi yang mendasarinya baik di PKL maupun secara langsung di ekuitas.

Manfaat pajak yang diperoleh sebagai bagian dari kombinasi bisnis, tetapi tidak memenuhi kriteria untuk pengakuan terpisah pada tanggal tersebut, diakui selanjutnya jika informasi baru tentang fakta dan keadaan berubah. Penyesuaian tersebut diperlakukan sebagai pengurangan *goodwill* (selama tidak melebihi *goodwill*) jika terjadi selama periode pengukuran atau diakui dalam laba rugi.

Grup melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk saling hapus aset pajak kini dan liabilitas pajak kini dan aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas baik entitas kena pajak yang sama atau entitas kena pajak yang berbeda yang bermaksud untuk menyelesaikan liabilitas dan aset pajak kini secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan di mana jumlah liabilitas atau aset pajak tangguhan yang signifikan diharapkan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

Pajak Pertambahan Nilai

Pendapatan, beban-beban dan aset-aset diakui neto atas jumlah PPN kecuali:

- PPN yang muncul dari pembelian aset atau jasa yang tidak dapat dikreditkan, yang dalam hal ini PPN diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset atau sebagai bagian dari item beban-beban yang terkait; dan
- Piutang dan utang yang disajikan termasuk dengan jumlah PPN.

Jumlah PPN neto yang diajukan untuk direstitusi, atau terutang kepada, kantor pajak termasuk sebagai bagian dari aset atau liabilitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

s. Taxation (continued)

Deferred Tax (continued)

Deferred tax relating to items recognized outside profit or loss is recognized outside profit or loss. Deferred tax items are recognized in correlation to the underlying transaction either in OCI or directly in equity.

Tax benefits acquired as part of a business combination, but not satisfying the criteria for separate recognition at that date, are recogn ised subsequently if new information about facts and circumstances change. The adjustment is either treated as a reduction in goodwill (as long as it does not exceed goodwill) if it was incurred during the measurement period or recognized in profit or loss.

The Group offsets deferred tax assets and deferred tax liabilities if and only if it has a legally enforceable right to set off current tax assets and current tax liabilities and the deferred tax assets and deferred tax liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable entities which intend either to settle current tax liabilities and assets on a net basis, or to realise the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.

Value Added Tax

Revenue, expenses and assets are recognized net of the amount of VAT except:

- *Where the VAT incurred on a purchase of assets or services is not recoverable, in which case the VAT is recognized as part of the cost of acquisition of the asset or as part of the expense item as applicable; and*
- *Receivables and payables that are stated with the amount of VAT included.*

The net amount of VAT which is claimed for restitution from, or payable to, the taxation authorities is included as part of assets or liabilities in the consolidated statement of financial position.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

s. Perpajakan (lanjutan)

Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan

Sesuai dengan ISAK 123: Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2019, pengakuan dan pengukuran aset dan liabilitas pajak yang mengandung ketidakpastian perlakuan pajak penghasilan ditentukan dengan mempertimbangkan apakah diperlakukan secara terpisah atau bersamaan, penggunaan asumsi tentang pemeriksaan atas perlakuan pajak tidak pasti oleh otoritas perpajakan, pertimbangan apakah besar kemungkinan Otoritas Pajak akan menerima perlakuan pajak tidak pasti dan penilaian kembali pertimbangan atau estimasi yang disyaratkan jika terjadi perubahan fakta dan keadaan.

Jika penerimaan perlakuan pajak dimungkinkan oleh Otoritas Pajak, pengukuran tersebut sejalan dengan pengisian pajak penghasilan. Jika penerimaan perlakuan pajak oleh Otoritas Pajak tidak memungkinkan, Grup menggunakan jumlah pajak dengan menggunakan metode yang memberikan prediksi resolusi yang lebih baik (yaitu jumlah yang paling mungkin atau nilai yang diharapkan).

Oleh karena itu, manajemen berkeyakinan bahwa interpretasi tersebut tidak memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian.

t. Imbalan Kerja

Imbalan Pascakerja

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun iuran pasti (Program Pensiun) untuk semua karyawan tetapnya yang telah memenuhi kriteria dan liabilitas imbalan kerja yang tidak didanai yang ditentukan berdasarkan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) yang berlaku.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

s. Taxation (continued)

Uncertainty over Income Tax

In accordance with ISAK 123: Uncertainty Over Income Tax Treatments which is effective on January 1, 2019, stated that the recognition and measurement of tax assets and liabilities that contain uncertainty over income tax are determined by considering whether to be treated separately or together, the assumptions used in the examination of tax treatments by the Tax Authorities, consideration the probability that the Tax Authorities will accept uncertain tax treatment and re-consideration or estimation if there is a change in facts and circumstances.

If the acceptance of the tax treatment by the Tax Authorities is probable, the measurement is in line with income tax fillings. If the acceptance of the tax treatment by the Tax Authorities is not possible, the Group measures its tax balances using the method that provides the better predict of resolution (i.e. most likely amount or expected value).

Accordingly, management believes that the interpretation did not have a significant impact on the consolidated financial statements.

t. Employee Benefits

Post-Employment Benefits

The Company has a defined contribution retirement plan (Pension Plan) covering all of its qualified permanent employees and an unfunded employee benefit liability determined in accordance with the existing Collective Labor Agreement (CLA).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

t. Imbalan Kerja (lanjutan)

Imbalan Pascakerja (lanjutan)

Liabilitas imbalan kerja yang tidak didanai tersebut dihitung dengan membandingkan imbalan yang akan diterima oleh karyawan pada usia normal pensiun dari Program Pensiun dengan imbalan sesuai dengan KKB, setelah dikurangi dengan akumulasi kontribusi pemberi kerja dan hasil pengembangannya. Jika bagian pemberi kerja pada imbalan Program Pensiun kurang dari imbalan yang diharuskan oleh KKB, Perusahaan akan mencadangkan kekurangan tersebut.

Perusahaan memberikan imbalan kerja lainnya, seperti imbalan kesehatan dan uang penghargaan. Hak atas imbalan ini pada umumnya diberikan apabila karyawan bekerja hingga mencapai usia pensiun dan memenuhi masa kerja tertentu. Estimasi biaya imbalan ini diakru sepanjang masa kerja karyawan, dengan menggunakan metodologi akuntansi yang sama dengan metodologi yang digunakan dalam perhitungan program pensiun imbalan pasti.

Kewajiban imbalan pensiun tersebut merupakan nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi dengan nilai wajar aset program dan penyesuaian atas keuntungan atau kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu yang belum diakui. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected-unit-credit*.

Beban untuk imbalan kerja berdasarkan KKB/UU/imbalan kesehatan pascakerja ditentukan dengan menggunakan metode *projected-unit-credit*. Laba atau rugi aktuarial diakui sebagai penghasilan atau beban apabila akumulasi keuntungan atau kerugian aktuarial neto yang belum diakui pada akhir tahun pelaporan sebelumnya melebihi total 10% dari nilai kini kewajiban imbalan pasti (*present value of the defined benefit obligation*) pada tanggal tersebut.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

t. Employee Benefits (continued)

Post-Employment Benefits (continued)

The unfunded employee benefit liability is calculated by comparing the benefit that will be received by an employee at normal pension age from the Pension Plan with the benefit as stipulated in the CLA, after deducting the accumulated employer contribution and the related investment results. If the employer-funded portion of the Pension Plan benefit is less than the benefit as required by the CLA, the Company reserves for such shortfall.

The Company also provides other post-employment benefits, such as healthcare benefits and service pay to their retirees. The entitlement to these benefits are usually based on the employee remaining in service up to retirement age and the completion of a minimum service period. The estimation costs of these benefits are accrued over the period of employment, using an accounting methodology similar to defined benefit pension plans.

The pension benefit obligation is the present value of the defined benefit obligation at end of the reporting period less the fair value of plan assets, together with adjustments for unrecognized actuarial gains or losses and prior service costs. The defined benefit obligation is calculated annually by an independent actuary using the projected-unit-credit method.

The costs of providing employee benefits under the CLA/Law/post-retirement healthcare benefits plan are determined using the projected-unit-credit method. Actuarial gains or losses are recognized as income or expense when the net cumulative unrecognized actuarial gains or losses for each individual plan at the end of the previous reporting year exceeded 10% of the present value of the defined benefit obligation at that date.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

t. Imbalan Kerja (lanjutan)

Imbalan pascakerja (lanjutan)

Keuntungan atau kerugian yang melebihi ketentuan 10% diakui selama rata-rata sisa masa kerja yang diperkirakan dari para pekerja dalam program tersebut. Lebih lanjut, biaya jasa lalu yang terjadi ketika Perusahaan memperkenalkan program imbalan pasti atau terjadinya perubahan atas imbalan yang terhutang dari program yang berlaku saat ini harus diamortisasi selama periode sampai imbalan tersebut telah menjadi hak karyawan *(vested)*.

Biaya jasa lalu harus diakui sebagai beban pada saat yang lebih awal antara:

i) ketika program amandemen atau kurtailmen terjadi; dan
ii) ketika entitas mengakui biaya restrukturisasi atau imbalan terminasi terkait.

Bunga neto dihitung dengan menerapkan tingkat diskonto yang digunakan terhadap liabilitas imbalan kerja. Grup mengakui perubahan berikut pada kewajiban obligasi neto pada akun "Beban Umum dan Administrasi" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian:

i) Biaya jasa terdiri atas biaya jasa kini, biaya jasa lalu, keuntungan atau kerugian atas penyelesaian (*curtailment*) tidak rutin, dan
ii) Beban atau penghasilan bunga neto.

Pada tanggal 2 Februari 2021, Pemerintah mengundangkan dan memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 (PP 35/2021) untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185 (b) UU No. 11/2020 mengenai Cipta Kerja yang bertujuan untuk menciptakan lapangadan kerja yang seluas-luasnya.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

t. Employee Benefits (continued)

Post-employment benefits (continued)

These gains or losses in excess of the 10% threshold are amortized on a straight-line basis over the average of remaining working period of the employees estimates. Further, past service costs arising from the introduction of a defined benefit plan or changes in the benefits payable of an existing plan are required to be amortized over the period until the benefits concerned become vested.

Past service costs are recognized in profit or loss at the earlier between:

i) the date of the plan amendment or curtailment, and
ii) the date the Group recognizes related restructuring costs.

Net interest is calculated by applying the discount rate to the net defined benefit liability. The Group recognizes the following changes in the net defined benefit obligation under "General and Administrative Expenses" as appropriate in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income:

i) Service costs comprising current service costs, past-service costs, gains or losses on curtailments and non-routine settlements, and
ii) Net interest expense or income.

On February 2, 2021, the Government promulgated Government Regulation Number 35 Year 2021 (PP 35/2021) to implement the provisions of Article 81 and Article 185 (b) of Law No. 11/2020 concerning Job Creation (Cipta Kerja), which aims to create the widest possible employment opportunities.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

t. Imbalan Kerja (lanjutan)

Imbalan pascakerja (lanjutan)

PP 35/2021 mengatur mengenai perjanjian kerja waktu tertentu (karyawan tidak tetap), alih daya, waktu kerja, waktu istirahat dan pemutusan hubungan kerja, yang dapat memengaruhi manfaat imbalan minimum yang harus diberikan kepada karyawan. Penerapan peraturan tersebut tidak menghasilkan perubahan besar terhadap kebijakan akuntansi Grup dan tidak memilki dampak material pada jumlah yang dilaporkan untuk tahun keuangan saat ini.

Imbalan pascakerja lainnya

Imbalan kerja jangka panjang lainnya termasuk cuti besar yang ditentukan berdasarkan Peraturan Perusahaan. Perkiraan beban ini dihitung dan diakui sepanjang masa kerja karyawan dengan menggunakan metode yang diterapkan dalam menghitung kewajiban imbalan pascakerja. Kewajiban ini dihitung minimum satu tahun sekali oleh aktuaris independen. Imbalan jangka panjang lainnya yang telah menjadi hak karyawan diakui segera sebagai beban dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Program Iuran Pasti

Program iuran pasti merupakan program imbalan pascakerja, dimana entitas membayar iuran tetap kepada suatu entitas terpisah dan tidak memiliki kewajiban hukum ataupun konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut. Kewajiban untuk membayar iuran secara regular merupakan biaya imbalan kerja karyawan untuk periode dimana jasa diberikan oleh pekerja.

Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan bagi satu entitas dan liabilitas keuangan atau ekuitas bagi entitas lain.

u. Instrumen Keuangan

Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan bagi satu entitas dan liabilitas keuangan atau ekuitas bagi entitas lain.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

t. Employee Benefits (continued)

Post-employment benefits (continued)

PP 35/2021 regulates the work agreement for a certain period (non-permanent employees), outsourcing, working time, rest time and termination of employment, which can affect the minimum benefits that must be provided to employees. The implementation of the new regulation did not result in major changes to the Group's accounting policy and had no material impact on the amounts reported for the current.

Post-employment benefits lainnya

Other long term employment benefits included the long services leave benefit which is determined in compliance with the Company's Regulation. The expected costs of these benefits are calculated and recognized over the year of employment, using the method which is applied in calculating obligation for post-employment benefits. These obligations are calculated on a minimum once a year by an independent actuary. Other long term employment benefits that are vested, are recognized as expense immediately in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

Defined Contribution Plans

A defined contribution plan is a post-employment benefit plan in which the entity pays fixed contributions into a separate entity and will have no legal or constructive obligation to pay further amounts. Obligations for the regular contributions constitute employee benefit costs for the period during which services are rendered by employees.

A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

u. Financial Instruments

A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

u. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Aset keuangan diklasifikasikan pada saat pengakuan awal untuk selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("NWPKL"), atau nilai wajar melalui laba rugi ("NWLR").

Pada pengakuan awal, Grup mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada NWLR. Piutang usaha yang tidak mengandung komponen pembiayaan yang signifikan, dimana Grup telah menerapkan cara praktis, yaitu diukur pada harga transaksi yang ditentukan sesuai PSAK 115: *Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan*, seperti diungkapkan pada Catatan 2r.

Agar aset keuangan diklasifikasikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau NWPKL, aset keuangan harus menghasilkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga ("SPPB") dari jumlah pokok terutang. Penilaian ini disebut sebagai uji SPPB dan dilakukan pada tingkat instrumen.

Model bisnis Grup untuk mengelola aset keuangan mengacu pada bagaimana mereka mengelola aset keuangannya untuk menghasilkan arus kas. Model bisnis menentukan apakah arus kas akan dihasilkan dari penerimaan arus kas kontraktual, penjualan aset keuangan, atau keduanya.

Pengukuran Selanjutnya

Untuk tujuan pengukuran selanjutnya, aset keuangan diklasifikasikan dalam empat kategori:

- Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang),
- Aset keuangan pada NWPKL dengan reklasifikasi ke keuntungan dan kerugian kumulatif (instrumen utang),
- Aset keuangan pada NWPKL tanpa pendauran laba dan rugi kumulatif setelah penghentian pengakuan (instrumen ekuitas), dan
- Nilai wajar melalui laba rugi (NWLR).

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

u. Financial Instruments (continued)

Financial Assets

Initial Recognition and Measurement

Financial assets are classified, at initial recognition, as subsequently measured at amortised cost, fair value through other comprehensive income ("FVOCI"), and fair value through profit or loss ("FVTPL").

At initial recognition, the Group measures a financial asset at its fair value plus transaction costs, in the case of a financial asset not at FVTPL. Trade receivables that do not contain a significant financing component, for which the Group has applied the practical expedient are measured at the transaction price determined under PSAK 115: Revenue from contracts with customers*, as disclosed in Note 2r.*

In order for a financial asset to be classified and measured at amortized cost or FVOCI, it needs to give rise to cash flows that are 'solely payments of principal and interest ("SPPI")' on the principal amount outstanding. This assessment is referred to as the SPPI test and is performed at an instrument level.

The Group's business model for managing financial assets refers to how it manages its financial assets in order to generate cash flows. The business model determines whether cash flows will result from collecting contractual cash flows, selling the financial assets, or both.

Subsequent Measurement

For purposes of subsequent measurement, financial assets are classified in four categories:

- *Financial assets at amortized cost (debt instruments),*
- *Financial assets at FVOCI with recycling of cumulative gains and losses (debt instruments),*
- *Financial assets designated at FVOCI with no recycling of cumulative gains and losses upon derecognition (equity instruments), and*
- *Fair value through profit or loss (FVTPL).*

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

u. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya (lanjutan)

Pengukuran selanjutnya dari aset keuangan tergantung kepada klasifikasi masing-masing aset keuangan seperti berikut ini:

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang)

Grup mengukur aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- Aset keuangan dimiliki dalam model bisnis dengan tujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual, dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang merupakan SPPB dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif ("SBE") dan menjadi subjek penurunan nilai. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laba rugi pada saat aset dihentikan pengakuannya, dimodifikasi atau diturunkan nilainya.

Aset keuangan Grup yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi termasuk kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha, piutang lain-lain, aset kontrak, investasi pada penyertaan saham dan investasi pada surat utang yang merupakan bagian dari investasi jangka panjang, aset lancar lainnya dan aset tidak lancar lainnya.

Aset keuangan pada NWPKL dengan pendauran laba dan rugi kumulatif (instrumen utang)

Untuk instrumen utang yang diukur pada NWPKL, pendapatan bunga, revaluasi mata uang asing dan kerugian penurunan nilai atau pembalikan diakui dalam laporan laba rugi dan dihitung dengan cara yang sama seperti untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Perubahan nilai wajar yang tersisa diakui di PKL. Pada saat penghentian pengakuan, perubahan nilai wajar kumulatif yang diakui di PKL direklasifikasi ke laba rugi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

u. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Subsequent Measurement (continued)

The subsequent measurement of financial assets depends on their classification as described below:

Financial assets at amortized cost (debt instruments)

The Group measures financial assets at amortized cost if both of the following conditions are met:

- *The financial asset is held within a business model with the objective to hold financial assets in order to collect contractual cash flows, and*
- *The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are SPPI on the principal amount outstanding.*

Financial assets at amortized cost are subsequently measured using the effective interest ("EIR") method and are subject to impairment. Gains and losses are recognized in profit or loss when the asset is derecognized, modified or impaired.

The Group's financial assets at amortized cost includes cash and cash equivalents, short-term investment, trade receivables, other receivables, contract assets, investment in share of stocks and investment in bonds under long-term investment, other current assets and other non-current assets.

Financial assets at FVOCI with recycling of cumulative gains and losses (debt instruments)

For debt instruments at FVOCI, interest income, foreign exchange revaluation and impairment losses or reversals are recognized in the statement of profit or loss and computed in the same manner as for financial assets measured at amortized cost. The remaining fair value changes are recognized in OCI. Upon derecognition, the cumulative fair value change recognized in OCI is recycled to profit or loss.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

u. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya (lanjutan)

Aset keuangan pada NWPKL dengan pendauran laba dan rugi kumulatif (instrumen utang) (lanjutan)

Instrumen utang Grup yang diukur pada NWPKL termasuk investasi pada instrumen utang dengan kuotasi yang termasuk dalam aset keuangan tidak lancar lainnya.

Aset keuangan pada NWPKL tanpa reklasifikasi keuntungan dan kerugian kumulatif setelah penghentian pengakuan (instrumen ekuitas).

Pada pengakuan awal, Grup dapat memilih untuk menetapkan klasifikasi yang tidak dapat dikembalikan atas investasi pada instrumen ekuitas sebagai NWPKL jika memenuhi definisi ekuitas sesuai PSAK 232: *Instrumen keuangan* dan tidak dimiliki untuk diperdagangkan. Klasifikasi ditentukan atas basis instrumen per instrumen.

Keuntungan dan kerugian atas aset keuangan ini tidak pernah didaur ke laba rugi, dan aset keuangan ini tidak menjadi subjek penurunan nilai. Dividen diakui sebagai penghasilan lain-lain dalam laba rugi pada saat hak atas pembayaran telah ditetapkan.

Grup memilih untuk mengklasifikasi secara takterbatalkan investasi ekuitas yang tidak terdaftar di bursa masuk dalam kategori ini.

Aset Keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi (“NWLR”)

Aset keuangan pada NWLR tercatat dalam laporan posisi keuangan pada nilai wajar dengan perubahan neto nilai wajar yang diakui dalam laporan laba rugi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

u. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Subsequent Measurement (continued)

Financial assets at FVOCI with recycling of cumulative gains and losses (debt instruments) (continued)

The Group’s debt instruments at FVOCI includes investments in quoted debt instruments included under other non-current financial assets.

Financial assets designated at FVOCI with no recycling of cumulative gains and losses upon derecognition (equity instruments).

Upon initial recognition, the Group can elect to classify irrevocably its investments in equity instruments at FVOCI when they meet the definition of equity under PSAK 232 Financial instruments: Presentation and are not held for trading. The classification is determined on an instrument-by-instrument basis.

Gains and losses on these financial assets are never recycled to profit or loss, and these financial assets are not subject to impairment assessment. Dividends are recognized as other income in the profit or loss when the right of payment has been established.

The Group elected to classify irrevocably its non-listed equity investments under this category.

Financial assets at fair value through profit or loss (“FVTPL”)

Financial assets at FVTPL are carried in the statement of financial position at fair value with net changes in fair value recognized in the statement of profit or loss.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

u. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya (lanjutan)

Kategori ini termasuk instrumen derivatif dan investasi ekuitas yang diperdagangkan di bursa efek yang mana oleh Grup diklasifikasikan secara tak terbatalkan pada NWPKL. Dividen atas investasi ekuitas yang tercatat di bursa diakui sebagai pendapatan lain-lain dalam laporan laba rugi pada saat hak atas pembayaran telah ditetapkan.

Derivatif melekat dalam kontrak hibrida, dengan liabilitas keuangan atau kontrak utama non-keuangan, dipisahkan dari kontrak utamanya dan dicatat sebagai derivatif terpisah jika: karakteristik ekonomi dan risiko tidak berkaitan erat dengan kontrak utamanya; instrumen terpisah dengan persyaratan yang sama dengan derivatif melekat akan memenuhi definisi derivatif; dan kontrak hibrida ini tidak diukur pada NWLR. Derivatif melekat diukur pada nilai wajar dengan perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi. Penilaian ulang hanya terjadi jika terdapat perubahan baik dalam persyaratan kontrak yang secara signifikan mengubah arus kas yang sebaliknya akan diperlukan, atau reklasifikasi aset keuangan diluar dari kategori NWLR.

Penghentian Pengakuan

Aset keuangan (atau, sesuai dengan kondisinya, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) terutama dihentikan pengakuannya (yaitu, dihapuskan dari laporan posisi keuangan konsolidasian Grup) ketika:

- Hak untuk menerima arus kas dari aset telah berakhir;
  Atau

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

u. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Subsequent Measurement (continued)

This category includes derivative instruments and listed equity investments which the Group had not irrevocably elected to classify at FVOCI. Dividends on listed equity investments are recognized as other income in the statement of profit or loss when the right of payment has been established.

A derivative embedded in a hybrid contract, with a financial liability or non-financial host, is separated from the host and accounted for as a separate derivative if: the economic characteristics and risks are not closely related to the host; a separate instrument with the same terms as the embedded derivative would meet the definition of a derivative; and the hybrid contract is not measured at FVTPL. Embedded derivatives are measured at fair value with changes in fair value recognized in profit or loss. Reassessment only occurs if there is either a change in the terms of the contract that significantly modifies the cash flows that would otherwise be required or a reclassification of a financial asset out of the FVTPL category.

Derecognition

A financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is primarily derecognized (i.e., removed from the Group's consolidated statement of financial position) when:

- *The rights to receive cash flows from the asset have expired;*
  Or

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

u. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan (lanjutan)

Aset keuangan (atau, sesuai dengan kondisinya, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) terutama dihentikan pengakuannya (yaitu, dihapuskan dari laporan posisi keuangan konsolidasian Grup) ketika: (lanjutan)

- Grup telah mengalihkan haknya untuk menerima arus kas dari aset atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan yang material kepada pihak ketiga berdasarkan kesepakatan '*pass-through*', dan salah satu dari (a) Grup telah mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Grup tidak mengalihkan maupun tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat atas aset, tetapi telah mengalihkan kendali atas aset.

Ketika Grup telah mengalihkan haknya untuk menerima arus kas dari suatu aset atau telah menandatangani kesepakatan '*pass-through*', Grup mengevaluasi jika, dan sejauh mana, Grup masih mempertahankan risiko dan manfaat atas kepemilikan aset. Ketika Grup tidak mengalihkan maupun seluruh risiko dan manfaat atas aset dipertahankan secara substansial, maupun tidak mengalihkan kendali atas aset, Grup tetap mengakui aset yang dialihkan sebesar keterlibatan berkelanjutannya. Dalam kasus tersebut, Grup juga mengakui liabilitas terkait. Aset yang dialihkan dan liabilitas terkait diukur dengan basis yang mencerminkan hak dan kewajiban yang masih dipertahankan oleh Grup.

Keterlibatan berkelanjutan dalam bentuk jaminan atas aset yang ditransfer, diukur pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat awal aset dan jumlah maksimum imbalan yang dibutuhkan oleh Grup untuk membayar kembali.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

u. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Derecognition (continued)

A financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is primarily derecognized (i.e., removed from the Group's consolidated statement of financial position) when: (continued)

- *The Group has transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a 'pass-through' arrangement; and either (a) the Group has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Group has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.*

When the Group has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement, it evaluates if, and to what extent, it has retained the risks and rewards of ownership. When it has neither transferred nor retained substantially all of the risks and rewards of the asset, nor transferred control of the asset, the Group continues to recognize the transferred asset to the extent of its continuing involvement. In that case, the Group also recognizes an associated liability. The transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Group has retained.

Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the Group could be required to repay.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

u. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai

Grup mengakui penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian ("KKE") untuk semua instrumen utang yang bukan diukur pada NWLR dan kontrak jaminan keuangan. KKE ditentukan atas perbedaan antara arus kas kontraktual menurut kontrak dan semua arus kas yang diharapkan akan diterima oleh Grup, yang didiskontokan dengan perkiraan SBE orisinal. Arus kas yang diharapkan mencakup setiap arus kas dari penjualan agunan yang dimiliki atau perbaikan kredit lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam ketentuan kontrak.

KKE diakui dalam dua tahap. Bila belum terdapat peningkatan risiko kredit signifikan sejak pengakuan awal, KKE diakui untuk kerugian kredit yang dihasilkan dari peristiwa gagal bayar yang mungkin terjadi dalam jangka waktu 12 bulan ke depan (KKE 12 bulan). Namun, bila telah terdapat peningkatan signifikan risiko kredit sejak pengakuan awal, penyisihan kerugian diakui untuk kerugian kredit yang diperkirakan selama sisa umur aset, tanpa mempertimbangkan waktu gagal bayar (KKE sepanjang umurnya).

Karena aset kontrak, piutang usaha dan piutang lain-lainnya tidak memiliki komponen pembiayaan signifikan, Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan dalam perhitungan KKE. Oleh karena itu, Grup tidak menelurusi perubahan dalam risiko kredit, namun justru mengakui penyisihan kerugian berdasarkan KKE sepanjang umurnya pada setiap tanggal pelaporan. Grup membentuk matriks provisi berdasarkan pengalaman kerugian kredit masa lampau, disesuaikan dengan perkiraan masa depan (*forward-looking*) atas faktor yang spesifik untuk debitur dan lingkungan ekonomi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

u. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Impairment

The Group recognizes an allowance for ECL for all debt instruments not held at FVTPL and financial guarantee contracts. ECLs are based on the difference between the contractual cash flows due in accordance with the contract and all the cash flows that the Group expects to receive, discounted at an approximation of the original EIR. The expected cash flows include any cash flows from the sale of collateral held or other credit enhancements that are integral to the contractual terms.

ECLs are recognized in two stages. When there have been significant increases in credit risks since initial recognition, ECLs are provided for credit losses that result from default events that are possible within the next 12-months (a 12-month ECL). But, when there have been significant increases in credit risks since initial recognition, a loss allowance is recognized for credit losses expected over the remaining life of the asset, irrespective of timing of the default (a lifetime ECL).

Because its contract assets, trade and other receivables do not contain significant financing component, the Group applies a simplified approach in calculating ECL. Therefore, the Group does not track changes in credit risk, but instead recognizes a loss allowance based on lifetime ECL at each reporting date. The Group established a provision matrix that is based on its historical credit loss experience, adjusted for forward-looking factors specific to the debtors and the economic environment.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

u. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai (lanjutan)

Untuk instrumen utang pada NWPKL, Grup menerapkan penyederhanaan sehubungan dengan risiko kredit rendah. Setiap tanggal pelaporan, Grup mengevaluasi apakah instrumen utang tersebut dianggap memiliki risiko kredit rendah dengan menggunakan semua informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau usaha yang berlebihan. Dalam melakukan evaluasi tersebut, Grup menilai kembali peringkat kredit internal dari instrumen utang tersebut.

Instrumen utang Grup pada NWPKL hanya terdiri dari obligasi kuotasi yang dinilai dalam kategori investasi teratas. Oleh karena itu, dianggap sebagai investasi dengan risiko kredit rendah. Merupakan kebijakan Grup untuk mengukur KKE pada instrumen tersebut setiap 12 bulan. Namun, jika terjadi peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak diterbitkan, penyisihan akan didasarkan pada KKE sepanjang umurnya.

Liabilitas Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Liabilitas keuangan diklasifikasikan, pada pengakuan awal, sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada NWLR, utang dan pinjaman atau derivatif ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai pada lindung nilai yang efektif, sesuai dengan kondisinya.

Semua liabilitas keuangan diakui pada nilai wajar saat pengakuan awal dan, dalam hal liabilitas keuangan diklasifikasi sebagai utang dan pinjaman, diakui pada nilai wajar setelah dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Grup menetapkan liabilitas keuangannya sebagai utang dan pinjaman, seperti pinjaman bank jangka pendek, utang usaha, beban akrual, liabilitas jangka pendek lainya, utang bank jangka panjang, utang obligasi, utang lembaga keuangan non-bank, liabilitas jangka panjang lainnya, dan liabilitas sewa.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

u. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Impairment (continued)

For debt instruments at FVOCI, the Group applies the low credit risk simplification. At every reporting date, the Group evaluates whether the debt instrument is considered to have low credit risk using all reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort. In making that evaluation, the Group reassesses the internal credit rating of the debt instrument.

The Group's debt instruments at FVOCI comprise solely of quoted bonds that are graded in the top investment category. Therefore, are considered to be low credit risk investments. It is the Group's policy to measure ECLs on such instruments on a 12-month basis. However, when there has been a significant increase in credit risk since origination, the allowance will be based on the lifetime ECL.

Financial Liabilities

Initial Recognition and Measurement

Financial liabilities are classified, at initial recognition, as financial liabilities at FVTPL, loans and borrowings, or as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate.

All financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of loans and borrowings and payables, net of directly attributable transaction costs.

The Group designates its financial liabilities as loans and borrowings, such as short-term bank loans, trade payables, accrued expenses, other current liability, long-term bank loans, bonds payable, loan from non-bank financial institution, other non-current liabilities, and lease liabilities.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

u. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya

Pengukuran selanjutnya dari liabilitas keuangan ditentukan oleh klasifikasinya sebagai berikut:

Liabilitas keuangan pada NWLR

Liabilitas keuangan yang diukur pada NWLR mencakup liabilitas keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang diukur pada NWLR yang ditetapkan saat pengakuan awal.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan, jika liabilitas keuangan tersebut diperoleh untuk tujuan dibeli kembali dalam waktu dekat. Kategori ini juga mencakup instrumen keuangan derivatif yang dilakukan oleh Grup dimana instrumen derivatif tersebut tidak ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam hubungan lindung nilai sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 109: Instrumen keuangan. Derivatif melekat yang dipisahkan juga diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan kecuali ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif.

Keuntungan atau kerugian atas liabilitas yang dimiliki untuk diperdagangkan diakui dalam laporan laba rugi.

Pengakuan dan Pengukuran Awal (lanjutan)

Liabilitas keuangan yang diukur pada NWLR yang ditetapkan saat pengakuan awal harus memenuhi kriteria dalam PSAK 109 dan ditetapkan pada tanggal pengakuan awal. Grup tidak menetapkan liabilitas keuangan apapun sebagai liabilitas yang diukur pada NWLR.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

u. Financial Instruments (continued)

Financial Liabilities (continued)

Subsequent Measurement

The subsequent measurement of financial liabilities depends on their classification as described below:

Financial liabilities at FVTPL

Financial liabilities at FVTPL include financial liabilities held for trading and financial liabilities designated upon initial recognition as at FVTPL.

Financial liabilities are classified as held for trading if they are incurred for the purpose of repurchasing in the near term. This category also includes derivative financial instruments entere into by the Group that are not designated as hedging instruments in hedge relationships as defined by PSAK 109: Financial instruments. Separated embedded derivatives are also classified as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments.

Gains or losses on liabilities held for trading are recognized in the statement of profit or loss.

Initial Recognition and Measurement (continued)

Financial liabilities designated upon initial recognition at FVTPL are designated at the initial date of recognition, and only if the criteria in PSAK 109 are satisfied. The Group has not designated any financial liability as at FVTPL.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

u. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran Awal (lanjutan)

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (Utang dan pinjaman) (lanjutan)

(i) Utang dan Pinjaman Jangka Panjang yang Dikenakan Bunga
Setelah pengakuan awal, utang dan pinjaman jangka panjang yang berbunga diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode SBE. Pada tanggal pelaporan, biaya bunga yang masih harus dibayar dicatat secara terpisah, dari pokok pinjaman terkait, dalam bagian liabilitas jangka pendek. Keuntungan dan kerugian diakui pada laba rugi ketika liabilitas dihentikan pengakuannya maupun melalui proses amortisasi menggunakan metode SBE.

Biaya amortisasi dihitung dengan mempertimbangkan setiap diskonto atau premium atas akusisi dan komisi atau biaya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SBE. Amortisasi SBE dicatat sebagai beban keuangan pada laba rugi.

(ii) Utang dan Akrual
Liabilitas untuk utang usaha dan utang lain-lain jangka pendek, beban akrual dan liabilitas imbalan kerja jangka pendek dinyatakan sebesar jumlah tercatat (jumlah nosional), yang kurang lebih sebesar nilai wajarnya.

Penghentian Pengakuan

Suatu liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak berakhir atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

u. Financial Instruments (continued)

Financial Liabilities (continued)

Initial Recognition and Measurement (continued)

Financial liabilities at amortized cost (Loans and borrowings) (continued)

(i) Long-term Interest-bearing Loans and Borrowings
Subsequent to initial recognition, long-term interest-bearing loans and borrowings are measured at amortized acquisition costs using EIR method. At the reporting dates, accrued interest is recorded separately from the associated borrowings within the current liabilities section. Gains and losses are recognized in the profit or loss when the liabilities are derecognized as well as through the EIR amortization process.

Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fee or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortization is included in finance costs in the profit or loss.

(ii) Payables and Accruals
Liabilities for current trade and other accounts payable, accrued expenses and short-term employee benefits liability are stated at carrying amounts (notional amounts), which approximate their fair values.

Derecognition

A financial liability is derecognized when the obligation under the contract is discharged or cancelled or expires.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

u. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan (lanjutan)

Ketika sebuah liabilitas keuangan ditukar dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama atas persyaratan yang secara substansial berbeda, atau bila persyaratan dari liabilitas keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi persyaratan tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan orisinal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui pada laba rugi.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disaling hapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah tercatat dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

v. Instrumen keuangan dan akuntansi lindung nilai

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Grup menggunakan instrumen keuangan berupa utang obligasi dan pinjaman sindikasi untuk melakukan lindung nilai atas risiko mata uang asing.

Untuk tujuan akuntansi lindung nilai, lindung nilai diklasifikasikan sebagai lindung nilai arus kas ketika melakukan lindung nilai atas eksposur terhadap variabilitas dalam arus kas yang dapat diatribusikan pada risiko tertentu yang terkait dengan aset atau liabilitas yang diakui atau prakiraan transaksi yang kemungkinan besar terjadi atau risiko mata uang asing dalam komitmen pasti yang tidak diakui.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

u. Financial Instruments (continued)

Financial Liabilities (continued)

Derecognition (continued)

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the profit or loss.

Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are offset, and the net amount reported in the consolidated statement of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

v. Financial instruments and hedge accounting

Initial Recognition and Measurement

The Group uses financial instruments in the form of bonds payable and syndicated loan to hedge its foreign currency risk.

For the purpose of hedge accounting, hedges are classified as cash flow hedges when hedging the exposure to variability in cash flows that is either attributable to a particular risk associated with a recognized asset or liability or a highly probable forecast transaction or the foreign currency risk in an unrecognized firm commitment.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

v. Instrumen keuangan dan akuntansi lindung nilai (lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran Awal (lanjutan)

Pada saat insepsi hubungan lindung nilai, Grup secara formal menetapkan dan mendokumentasikan hubungan lindung nilai yang mana ingin diterapkan akuntansi lindung nilai dan tujuan serta strategi manajemen risiko untuk melakukan lindung nilai.

Dokumentasi mencakup identifikasi instrumen lindung nilai, item lindung nilai, sifat risiko yang dilindung nilai dan bagaimana Grup akan menilai apakah hubungan lindung nilai memenuhi persyaratan efektivitas lindung nilai (termasuk analisis sumber ketidakefektifan lindung nilai dan bagaimana rasio lindung nilai ditentukan). Hubungan lindung nilai memenuhi syarat untuk akuntansi lindung nilai jika memenuhi semua persyaratan efektivitas berikut:

- Ada 'hubungan ekonomik' antara item lindung nilai dan instrumen lindung nilai.
- Pengaruh risiko kredit tidak 'mendominasi perubahan nilai' yang dihasilkan dari hubungan ekonomik tersebut.
- Rasio lindung nilai dari hubungan lindung nilai adalah rasio yang sama yang dihasilkan dari kuantitas item lindung nilaian yang aktual digunakan oleh Grup melindungi nilai sejumlah kuantitas instrumen lindung nilaian yang secara aktual digunakan oleh Grup untuk melindungi sejumlah kuantitas item lindung nilaian.

Lindung nilai atas arus kas

Grup menggunakan utang obligasi dan pinjaman sebagai lindung nilai dari eksposur risiko mata uang asing dalam pendapatan yang akan diterima di masa yang akan datang.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

v. Financial instruments and hedge accounting (continued)

Initial Recognition and Measurement (continued)

At the inception of a hedge relationship, the Group formally designates and documents the hedge relationship to which it wishes to apply hedge accounting and the risk management objective and strategy for undertaking the hedge.

The documentation includes identification of the hedging instrument, the hedged item, the nature of the risk being hedged and how the Group will assess whether the hedging relationship meets the hedge effectiveness requirements (including the analysis of sources of hedge ineffectiveness and how the hedge ratio is determined). A hedging relationship qualifies for hedge accounting if it meets all of the following effectiveness requirements:

- *There is 'an economic relationship' between the hedged item and the hedging instrument.*
- *The effect of credit risk does not 'dominate the value changes' that result from that economic relationship.*
- *The hedge ratio of the hedging relationship is the same as that resulting from the quantity of the hedged item that the Group actually hedges and the quantity of the hedging instrument that the Group actually uses to hedge that quantity of hedged item.*

Cash flow hedges

The Group uses bonds payable and loan to hedge its exposure to foreign currency risk for revenues to be received in the future.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

v. Instrumen keuangan dan akuntansi lindung nilai (lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran Awal (lanjutan)

Bagian yang efektif atas perubahan nilai wajar instrumen keuangan yang ditujukan dan memenuhi kualifikasi sebagai lindung nilai arus kas, diakui sebagai "Penghasilan komprehensif lain" pada bagian ekuitas. Keuntungan atau kerugian atas bagian yang tidak efektif diakui langsung sebagai laba atau rugi. Jumlah akumulasi keuntungan atau kerugian dalam ekuitas dibebankan sebagai laba atau rugi komprehensif ketika unsur yang dilindungi nilainya mempengaruhi laba neto. Ketika instrumen lindung nilai kadaluwarsa atau ketika suatu lindung nilai tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai akuntansi lindung nilai, akumulasi keuntungan maupun kerugian yang ada pada ekuitas saat itu dibebankan sebagai laba atau rugi.

Cadangan lindung nilai atas arus kas disesuaikan dengan jumlah yang lebih rendah antara keuntungan atau kerugian kumulatif dari instrumen lindung nilai dan perubahan kumulatif nilai wajar dari item lindung nilaian.

w. Laba per Saham

Laba per saham dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar selama periode yang bersangkutan.

Laba per saham dilusian dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada tahun pelaporan, yang disesuaikan untuk mengasumsikan konversi efek berpotensi saham biasa yang sifatnya dilutif.

Pada tahun 2025 dan 2024, laba per saham dihitung menggunakan total rata-rata tertimbang saham yang beredar setelah terjadinya kombinasi bisnis entitas sepengendali (Catatan 1f).

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

v. Financial instruments and hedge accounting (continued)

Initial Recognition and Measurement (continued)

The effective portion of changes in the fair value of the financial instruments that are designated and qualified as cash flow hedges are recognized in "Other comprehensive income" and reported to equity. The gain or loss relating to the ineffective portion is recognized immediately in profit or loss. Amounts accumulated in equity are recycled to profit or loss in the periods in which the hedged item will affect net profit. When a hedging instrument expires, or when a hedge no longer meets the criteria for hedge accounting, any cumulative gain or loss existing in equity at that time is charged to profit or loss.

The cash flow hedge reserve is adjusted to the lower of the cumulative gain or loss on the hedging instrument and the cumulative change in fair value of the hedged item.

w. Earnings per Share

Earnings per share is computed based on the weighted average number of issued and fully paid shares during the period.

Diluted earning per share is calculated by dividing profit for the year attributable to owners of the parent by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the reporting year, adjusted to assume conversion of all potential dilutive ordinary shares.

On 2025 and 2024, earnings per share is computed using total weighted-average number of shares after the event of business combination of entities under common control (Note 1f).

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

x. Provisi

Provisi diakui jika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

Provisi untuk biaya pembongkaran aset diestimasi berdasarkan beberapa asumsi dan disajikan pada nilai wajar sesuai dengan tingkat diskonto yang berlaku.

y. Informasi Segmen

Segmen adalah bagian yang dapat dibedakan dari Grup yang terlibat baik dalam menyediakan produk atau jasa tertentu (segmen usaha), maupun dalam menyediakan produk atau jasa dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan segmen lainnya.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen mencakup *item-item* yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai kepada segmen tersebut. Segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar Perusahaan dan Entitas Anak dieliminasi sebagai bagian dari proses konsolidasi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

x. Provision

Provisions are recognized when the Group has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

Provision for asset dismantling costs is estimated based on certain assumptions and carried at fair value based on applicable discount rates.

y. Segment Information

A segment is a distinguishable component of the Group that is engaged either in providing certain products or services (business segment), or in providing products or services within a particular economic environment (geographical segment), which is subject to risks and rewards that are different from those of other segments.

Segment revenue, expenses, results, assets and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment. Segments are determined before intra-group balances and intra-group transactions are eliminated as part of consolidation process.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

z. Klasifikasi Lancar dan Tak Lancar

Grup menyajikan aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan klasifikasi lancar/tak lancar. Suatu aset disajikan lancar bila:

1) akan direalisasi, dijual atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal,
2) untuk diperdagangkan,
3) akan direalisasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau
4) kas atau setara kas kecuali yang dibatasi penggunaannya atau akan digunakan untuk melunasi suatu liabilitas dalam kurun waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh aset lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

Suatu liabilitas disajikan lancar bila:

i) akan dilunasi dalam siklus operasi normal,
ii) untuk diperdagangkan,
iii) akan dilunasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau
iv) tidak ada hak untuk menangguhkan pelunasannya dalam kurun waktu 12 bulan setelah tanggal periode pelaporan.

Seluruh liabilitas lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

Aset dan kewajiban pajak tangguhan diklasifikasikan sebagai aset dan kewajiban tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

aa. Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima dari menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

i) Di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut, atau
ii) Jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

z. Current and Non-Current Classification

The Group presents assets and liabilities in the statement of financial position based on current/non-current classification. An asset is current when it is:

1) expected to be realised or intended to be sold or consumed in the normal operating cycle,
2) held primarily for the purpose of trading,
3) expected to be realised within 12 months after the reporting period, or
4) cash or cash equivalent unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least 12 months after the reporting period.

All other assets are classified as non-current.

A liability is current when it is:

i) expected to be settled in the normal operating cycle,
ii) held primarily for the purpose of trading,
iii) due to be settled within twelve months months after the reporting period, or
iv) there is no right at the end of reporting period to defer the settlement of the liability for at least twelve months months after the reporting period.

All other liabilities are classified as non-current.

Deferred tax assets and liabilities are classified as non-current assets and liabilities.

aa. Fair Value Measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

i) In the principal market for the asset or liability, or
ii) In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

aa. Pengukuran Nilai Wajar (lanjutan)

Pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan tersebut harus dapat diakses oleh Grup.

Nilai wajar dari aset atau liabilitas diukur dengan menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

Pengukuran nilai wajar dari suatu aset nonkeuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut pada penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaan dan data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, dengan memaksimalkan masukan (*input*) yang dapat diamati (*observable*) yang relevan dan meminimalkan masukan (*input*) yang tidak dapat diamati (*unobservable*).

Semua aset dan liabilitas yang nilai wajarnya diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian dikategorikan dalam hierarki nilai wajar berdasarkan *level* masukan *(input)* paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan sebagai berikut:

i) *Level* 1 - Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses entitas pada tanggal pengukuran.
ii) *Level* 2 - Teknik penilaian yang menggunakan tingkat masukan *(input)* yang paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar yang dapat diamati (*observable*) baik secara langsung atau tidak langsung.
iii) *Level* 3 - Teknik penilaian yang menggunakan tingkat masukan *(input)* yang paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar yang tidak dapat diamati (*unobservable*).

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

aa. Fair Value Measurement (continued)

The principal or the most advantageous market must be accessible to by the Group.

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest.

A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.

The Group uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the consolidated financial statements are categorized within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:

i) Level 1 - Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities.

ii) Level 2 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable.

iii) *Level 3 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

aa. Pengukuran Nilai Wajar (lanjutan)

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan konsolidasian secara berulang, Grup menentukan apakah terdapat perpindahan antara *level* dalam hierarki dengan melakukan evaluasi ulang atas penetapan kategori (berdasarkan *level* masukan *(input)* paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan) pada tiap akhir periode pelaporan.

Tim pelaporan keuangan Grup bertanggung-jawab atas penilaian dalam menentukan kebijakan dan prosedur untuk pengukuran nilai wajar berulang, seperti aset biologis, nilai wajar (dikurangi biaya untuk menjual) UPK (untuk uji penurunan nilai), dan aset keuangan pada NWPKL.

Penilai eksternal terlibat dalam penilaian aset signifikan, terutama aset biologis. Keterlibatan penilai eksternal ditentukan setiap tahun setelah dibahas dan disetujui oleh Direksi Perusahaan. Kriteria pemilihan termasuk pengetahuan pasar, reputasi, independensi dan kemampuan mematuhi standar profesi. Metode penilaian dan input yang digunakan dibahas dan diputuskan bersama oleh Grup dan penilai eksternal.

Untuk tujuan pengungkapan nilai wajar, Grup mementukan klasifikasi aset dan liabilitas berdasarkan sifat, karakteristik dan risikonya dan *level* pada hierarki nilai wajar sebagaimana dijelaskan diatas.

ab. Standar Akuntansi yang Telah Diterbitkan Namun Belum Berlaku Efektif

Standar akuntansi yang telah diterbitkan sampai tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian Grup namun belum berlaku efektif diungkapkan berikut ini. Manajemen bermaksud untuk menerapkan standar-standar tersebut yang dipertimbangkan relevan terhadap Grup pada saat efektif, dan dampaknya terhadap posisi dan kinerja keuangan konsolidasian Grup masih diestimasi pada tanggal 31 Maret 2026:

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

aa. Fair Value Measurement (continued)

For assets and liabilities that are recognized in the consolidated financial statements on a recurring basis, the Group determines whether transfers have occurred between levels in the hierarchy by re-assessing categorization (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.

The Group's financial reporting team in charge of valuation to determine the policies and procedures for recurring fair value measurement, such as biological assets and fair value (less costs of disposal) of CGUs (for impairment test purpose) and financial assets at FVOCI.

External valuers are involved for valuation of significant assets, in particular, the biological assets. Involvement of external valuers is decided upon annually after discussion with and approval by the Company's Board of Directors. Selection criteria include market knowledge, reputation, independence and whether professional standards are maintained. Valuation techniques and inputs to use were discussed and decided by the Group and external valuers.

For the purpose of fair value disclosures, the Group has determined classes of assets and liabilities on the basis of the nature, characteristics and risks of the asset or liability and the level of the fair value hierarchy as explained above.

ab. Accounting Standards Issued but Not Yet Effective

The accounting standards that have been issued up to the date of issuance of the Group's consolidated financial statements, but not yet effective are disclosed below. The management intends to adopt these standards that are considered relevant to the Group when they become effective, and the impact to the consolidated financial position and performance of the Group is still being estimated as of March 31, 2026:

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

ab. Standar Akuntansi yang Telah Diterbitkan Namun Belum Berlaku Efektif (lanjutan)

Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2026

Amendemen PSAK 109 and PSAK 107: Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan

Amandemen tersebut mencakup klarifikasi atas suatu liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada "tanggal penyelesaian" serta memperkenalkan pilihan kebijakan akuntansi (apabila kondisi tertentu terpenuhi) untuk menghentikan pengakuan liabilitas keuangan yang diselesaikan melalui sistem pembayaran elektronik sebelum tanggal penyelesaian. Selain itu, panduan tambahan ditambahkan mengenai bagaimana arus kas kontraktual untuk aset keuangan dengan fitur lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan (ESG) serta fitur serupa harus dinilai. Amandemen tersebut juga mengklarifikasi apa saja yang merupakan fitur *non-recourse* dan karakteristik instrumen yang terkait secara kontraktual. Selain itu, amandemen tersebut memperkenalkan persyaratan pengungkapan untuk instrumen keuangan dengan fitur kontinjensi serta persyaratan pengungkapan tambahan untuk instrumen ekuitas yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (OCI).

Amandemen tersebut berlaku efektif untuk periode tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2026, dengan penerapan dini diperkenankan hanya untuk klasifikasi aset keuangan dan pengungkapan terkait. Grup tidak memperkirakan bahwa amandemen tersebut akan memberikan dampak material terhadap laporan keuangan Grup.

Amendemen PSAK 109 and PSAK 107: Kontrak yang Mengacu Pada Listrik Bergantung Alam

Amandemen tersebut mengklarifikasi penerapan persyaratan *own-use* untuk kontrak yang berada dalam ruang lingkup, mengubah persyaratan penetapan (*designation*) atas item yang dilindungi dalam hubungan lindung nilai arus kas untuk kontrak-kontrak tersebut, serta menambahkan persyaratan pengungkapan baru untuk memungkinkan investor memahami dampak kontrak tersebut terhadap kinerja keuangan dan arus kas perusahaan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

ab. Accounting Standards Issued but Not Yet Effective (continued)

Effective beginning on or after January 1, 2026

Amendments to PSAK 109 and PSAK 107: Classification and Measurement of Financial Instruments

The amendments includes a clarification that a financial liability is derecognised on the 'settlement date' and the introduction of an accounting policy choice (if specific conditions are met) to derecognise financial liabilities settled using an electronic payment system before the settlement date. Further, additional guidance is added on how the contractual cash flows for financial assets with environmental, social and corporate governance (ESG) and similar features should be assessed. The amendments also clarifiies what constitute 'non-recourse features' and what are the characteristics of contractually linked instruments. The amendments also introduces of disclosures for financial instruments with contingent features and additional disclosure requirements for equity instruments classified at fair value through other comprehensive income (OCI).

The Amendments are effective for annual periods starting on or after January 1, 2026 with early adoption permitted for classification of financial assets and related disclosures only. The Group does not anticipate that the amendments will have a material effect on the Group's financial statements.

Amendments to PSAK 109 and PSAK 107: Contracts Referencing Nature-dependent Electricity

The amendments clarify the application of the 'own-use' requirements for in-scope contracts, amend the designation requirements for a hedged item in a cash flow hedging relationship for in-scope contracts, and add new disclosure requirements to enable investors to understand the effect of these contracts on a company's financial performance and cash flows.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

ab. Standar Akuntansi yang Telah Diterbitkan Namun Belum Berlaku Efektif (lanjutan)

Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2026 (lanjutan)

Amendemen PSAK 109 and PSAK 107: Kontrak yang Mengacu Pada Listrik Bergantung Alam (lanjutan)

Amandemen tersebut akan berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2026. Penerapan dini diperbolehkan, namun harus diungkapkan. Amandemen terkait pengecualian *own-use* diterapkan secara retrospektif, sedangkan amandemen akuntansi lindung nilai diterapkan secara prospektif untuk hubungan lindung nilai baru yang ditetapkan sejak tanggal penerapan awal. Selain itu, amandemen pengungkapan dalam PSAK 107 harus diterapkan bersamaan dengan amandemen PSAK 109. Grup tidak memperkirakan bahwa amandemen tersebut akan memberikan dampak material terhadap laporan keuangan Grup.

PSAK 338: Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali (Revisi 2025)

Pada Oktober 2025, DSAK IAI mengesahkan revisi atas PSAK 338: Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali. Revisi ini mencakup ruang lingkup dan penerapan dari metode penyatuan kepemilikan (*pooling of interest*) dan pelepasan di ekuitas (*disposal in equity*) sebagai konsep akuntansi yang digunakan dalam PSAK 338. Perubahan utama mencakup pengecualian entitas investasi dari ruang lingkup PSAK 338, serta tambahan definisi bisnis alihan, entitas penerima, dan entitas pengalih. Revisi ini juga mencakup rujukan jumlah tercatat bisnis alihan dan penyajian informasi prakombinasi bisnis ketika terjadi ketidakpraktisan dalam penerapan metode penyatuan kepemilikan. Revisi ini berlaku efektif 1 Januari 2026 dengan opsi penerapan dini.

Grup tidak memperkirakan bahwa amandemen tersebut akan memberikan dampak material terhadap laporan keuangan Grup.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

ab. Accounting Standards Issued but Not Yet Effective (continued)

Effective beginning on or after January 1, 2026 (continued)

Amendments to PSAK 109 and PSAK 107: Contracts Referencing Nature-dependent Electricity (continued)

The amendments will take effect for annual reporting periods starting on or after January 1, 2026. Early adoption is allowed, but it must be disclosed. The amendments concerning the own-use exception are to be applied retrospectively, while the hedge accounting amendments should be applied prospectively to new hedging relationships designated from the initial application date. Additionally, the PSAK 107 disclosure amendments must be implemented alongside the PSAK 109 amendments. The Group does not anticipate that the amendments will have a material effect on the Group's financial statements.

PSAK 338: Business Combination under Common Control (2025 Revision)

On October 2025, DSAK IAI issued revisions to PSAK 338: Business Combinations of Entities Under Common Control. The revisions cover the scope and application of the pooling of interest method and disposal in equity as the accounting concepts used in PSAK 338. The key changes include the exclusion of investment entities from the scope of PSAK 338, as well as the addition of definitions for transferred business, receiving entity, and transferring entity. The revision also includes references to the carrying amount of the transferred business and the presentation of pre-combination information when applying the pooling of interest method is impracticable. The revision is effective on January 1, 2026 with early adoption permitted.

The Group does not anticipate that the amendments will have a material effect on the Group's financial statements.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

ab. Standar Akuntansi yang Telah Diterbitkan Namun Belum Berlaku Efektif (lanjutan)

Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2026 (lanjutan)

Penyesuaian tahunan 2024

DSAK IAI menerbitkan Penyesuaian Tahunan 2024 SAK Indonesia), yang mencakup klarifikasi, penyederhanaan, koreksi, atau perubahan untuk meningkatkan konsistensi dalam PSAK 107 Instrumen Keuangan: Pengungkapan, PSAK 109 Instrumen Keuangan, PSAK 10 Laporan Keuangan Konsolidasian, dan PSAK 207 Laporan Arus Kas. Amandemen tersebut akan berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2026. Penerapan lebih awal diperkenankan dan harus diungkapkan. Amandemen tersebut tidak diharapkan menimbulkan dampak material terhadap laporan keuangan Grup.

Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2027

PSAK 118: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan

PSAK 118 akan menggantikan PSAK 201. Standar baru ini memperkenalkan persyaratan baru terkait penyajian dalam laporan laba rugi, termasuk total dan subtotal tertentu. Selain itu, entitas diwajibkan untuk mengklasifikasikan seluruh pendapatan dan beban dalam laporan laba rugi ke dalam salah satu dari lima kategori: operasi, investasi, pendanaan, pajak penghasilan, dan operasi yang dihentikan.

Standar ini juga mensyaratkan pengungkapan ukuran kinerja yang didefinisikan manajemen, subtotal pendapatan dan beban, serta mencakup persyaratan baru terkait agregasi dan disagregasi informasi keuangan

PSAK 118 berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2027, dengan penerapan dini diperkenankan dan harus diungkapkan. PSAK 118 akan diterapkan secara retrospektif.

Grup saat ini sedang mengidentifikasi seluruh dampak yang akan timbul atas laporan keuangan utama dan catatan atas laporan keuangan terkait implementasi amandemen tersebut.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

ab. Accounting Standards Issued but Not Yet Effective (continued)

Effective beginning on or after January 1, 2026 (continued)

Annual Improvements 2024

The DSAK IAI issued Annual Improvements 2024 to SAK Indonesia, which include clarifications, simplifications, corrections or changes to improve consistency in, PSAK 107 Financial instruments: Disclosure, PSAK 109 Financial Instruments, PSAK 110 Consolidated Financial Statements and PSAK 207 Statements of Cash Flows. The amendments will be effective for reporting periods beginning on or after 1 January 2026. Earlier application is permitted and must be disclosed. The amendments are not expected to have a material impact on the Group's financial statements.

Effective beginning on or after January 1, 2027

PSAK 118: Presentation and Disclosure in Financial Statements

PSAK 118 will replace PSAK 201. The new standard introduces new requirements for presentation within the statement of profit or loss, including specified totals and subtotals. Furthermore, entities are required to classify all income and expenses within the statement of profit or loss into one of five categories: operating, investing, financing, income taxes and discontinued operations.

The standard requires disclosure of newly defined management-defined performance measures, subtotals of income and expenses, and it also includes new requirements for aggregation and disaggregation of financial information.

PSAK 118 are effective for reporting periods beginning on or after January 1, 2027, but earlier application is permitted and must be disclosed. PSAK 118 will apply retrospectively.

The Group is currently working to identify all impacts the amendments will have on the primary financial statements and notes to the financial statements.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

ab. Standar Akuntansi yang Telah Diterbitkan Namun Belum Berlaku Efektif (lanjutan)

Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2027 (lanjutan)

PSAK 119: Entitas Anak Tanpa Akuntabilitas Publik - Pengungkapan

Standar baru tersebut memungkinkan entitas yang memenuhi syarat untuk memilih menerapkan pengungkapan yang lebih singkat dan tetap menerapkan persyaratan pengakuan, pengukuran, dan penyajian dalam standar akuntansi lainnya. Untuk memenuhi syarat, pada akhir periode pelaporan, entitas harus merupakan entitas anak sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 110, tidak memiliki akuntabilitas publik, dan memiliki entitas induk (baik entitas induk akhir atau entitas induk perantara) yang menyusun laporan keuangan konsolidasian yang tersedia untuk penggunaan publik dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan SAK Indonesia, SAK Internasional atau IFRS accounting standards.

PSAK 119 akan berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2027, dengan penerapan dini diperkenankan. Grup memperkirakan bahwa standar baru tersebut tidak akan memberikan dampak material terhadap laporan keuangan Grup.

ac. Dasar Penyajian Informasi Keuangan Entitas Induk

Laporan keuangan tersendiri disajikan sesuai dengan PSAK 227, "Laporan Keuangan Konsolidasian dan Tersendiri" (Catatan 55).

PSAK 227 menyatakan bahwa ketika sebuah entitas induk memilih untuk menyajikan laporan keuangan terpisah, laporan keuangan tersebut seharusnya hanya disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan tersendiri yang disajikan oleh entitas induk, di mana investasi dalam entitas anak, entitas asosiasi dan entitas dikendalikan bersama dicatat berdasarkan atas kepemilikan langsung dan bukan berdasarkan hasil yang dilaporkan dan aset neto entitas investasi.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

ab. Accounting Standards Issued but Not Yet Effective (continued)

Effective beginning on or after January 1, 2027 (continued)

PSAK 119: Subsidiaries without Public Accountability - Disclosures

The new standard allows eligible entities to elect to apply its reduced disclosure requirements and still applying the recognition, measurement and presentation requirements in other accounting standards. To be eligible, at the end of the reporting period, an entity must be a subsidiary as defined in PSAK 110, cannot have public accountability and must have a parent (ultimate or intermediate) that prepares consolidated financial statements, available for public use, which comply with SAK Indonesia, SAK Internasional or IFRS accounting standards.

PSAK 119 will become effective for reporting periods beginning on or after January 1, 2027, with early application permitted. The Group anticipates that the new standard will have no material effect on the Group's financial statements.

ac. Basis of Preparation of Parent Entity Financial Information

The separate financial statements are prepared in accordance with the PSAK 227, "Consolidated and Separate Financial Statements" (Note 55).

PSAK 227 provides that when a parent entity chose to present the separate financial statements, such financial statements should only be presented as supplementary information to the consolidated financial statements. Separate financial statements are those presented by a parent, in which the investments in the subsidiary, associate entity and jointly controlled entity are accounted for on the basis of the direct equity interest rather than on the basis of the reported results and net assets of the investees.

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

ac. Dasar Penyajian Informasi Keuangan Entitas Induk (lanjutan)

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan informasi keuangan entitas induk adalah sama dengan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak, kecuali untuk investasi pada entitas anak.

Sesuai dengan PSAK 227, entitas induk mencatat investasi pada entitas anak menggunakan metode biaya.

Entitas Induk juga mengakui dividen dari entitas anak dan entitas asosiasi pada laporan laba rugi dalam laporan keuangan tersendiri ketika hak menerima dividen ditetapkan.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

ac. Basis of Preparation of Parent Entity Financial Information (continued)

Accounting policies adopted in the preparation of the parent entity financial information are the same as the accounting policies adopted in the preparation of the Company and its subsidiaries consolidated financial statements, except for investments in subsidiaries.

In accordance with PSAK 227, the parent entity recorded the accounting for investments in subsidiaries using cost method.

The Parent Entity also recognizes dividends from subsidiaries and associate in profit or loss in its separate financial statements when its right to receive the dividends is established.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI YANG SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan.

Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas yang terpengaruh pada periode pelaporan berikutnya.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

Perpajakan

Ketidakpastian atas interpretasi dari peraturan pajak yang kompleks, perubahan peraturan pajak dan jumlah dan timbulnya penghasilan kena pajak di masa depan, dapat menyebabkan penyesuaian di masa depan atas penghasilan dan beban pajak yang telah dicatat.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

The preparation of the Group's consolidated financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosures of contingent liabilities, at the end of the reporting periods.

Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that may require material adjustments to the carrying amounts of the assets and liabilities affected in future periods.

Judgements

The following judgments are made by management in the process of applying the Group's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements:

Taxes

Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations, changes in tax laws, and the amount and timing of future taxable income, could necessitate future adjustments to tax income and expense already recorded.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Perpajakan (lanjutan)

Pertimbangan juga dilakukan dalam menentukan penyisihan atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal.

Grup mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Nilai tercatat neto utang pajak penghasilan badan pada 31 Desember 2025 sebesar Rp238.519.616 (2024: Rp158.982.075). Penjelasan lebih rinci mengenai pajak penghasilan diungkapkan dalam Catatan 24e.

Tagihan dan Keberatan atas Hasil Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, manajemen mempertimbangkan apakah jumlah yang tercatat dalam akun di atas dapat dipulihkan dan dikembalikan oleh Kantor Pajak. Nilai tercatat atas tagihan dan keberatan atas hasil pemeriksaan pajak Grup pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp851.589.996 (2024: Rp1.142.420.387). Penjelasan lebih lanjut atas akun ini diungkapkan pada Catatan 24a.

Grup menentukan masa sewa sesuai masa sewa yang tidak dapat terbatalkan, ditambah dengan setiap periode yang dicakup oleh opsi untuk memperpanjang sewa jika cukup pasti untuk mengeksekusi, atau setiap periode yang dicakup oleh opsi untuk menghentikan sewa, jika cukup pasti untuk tidak mengeksekusi opsi tersebut.

Opsi pembaruan dan penghentian dalam kontrak - Grup sebagai penyewa

Grup memiliki beberapa kontrak sewa yang mencakup opsi perpanjangan dan terminasi. Grup menerapkan pertimbangan dalam mengevaluasi apakah secara wajar akan menggunakan opsi untuk memperbarui atau mengakhiri sewa. Grup mempertimbangkan semua faktor relevan yang membentuk insentif ekonomi untuk melakukan pembaruan atau penghentian. Setelah tanggal permulaan, Grup menilai kembali masa sewa jika terdapat peristiwa atau perubahan signifikan yang berada dalam kendalinya dan mempengaruhi kemampuannya untuk menjalankan atau tidak menggunakan opsi untuk memperbarui atau untuk mengakhiri.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Judgements (continued)

Taxes (continued)

Judgment is also involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business.

The Group recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due. The net carrying amount of corporate income tax payable as of December 31, 2025 was Rp238,519,616 (2024: Rp158,982,075). Further details regarding taxation are disclosed in Note 24e.

Claims for Tax Refund and Tax Assessments Under Appeal

Based on the tax regulations currently enacted, the management judged if the amounts recorded under the above account are recoverable and refundable by the Tax Office. The carrying amount of the Group's claims for tax refund and tax assessments under appeal as of December 31, 2025 was Rp851,589,996 (2024:Rp1,142,420.387). Further explanations regarding this account are provided in Note 24a.

The Group determines the lease term as the non-cancellable term of the lease, together with any periods covered by an option to extend the lease if it is reasonably certain to be exercised, or any periods covered by an option to terminate the lease, if it is reasonably certain not to be exercised.

Lease term of contracts with renewal and termination options - the Group as lessee

The Group has several lease contracts that include extension and termination options. The Group applies judgement in evaluating whether it is reasonably certain to exercise the option to renew or terminate the lease or not. The Group considers all relevant factors that create an economic incentive for them to exercise either the renewal or termination. After the commencement date, the Group reassesses the lease term if there is a significant event or change in circumstances that is within its control and affects its ability to exercise or not to exercise the option to renew or to terminate.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Opsi pembaruan dan penghentian dalam kontrak - Grup sebagai penyewa

Pengungkapan lebih lanjut mengenai sewa terdapat pada Catatan 18.

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Penentuan Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional dari setiap entitas dalam Grup adalah mata uang dari lingkungan ekonomi utama di mana entitas tersebut beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang mempengaruhi sebagian besar pendapatan, biaya dan pendanaan masing-masing entitas.

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Grup menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan PSAK 109 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup seperti diungkapkan pada Catatan 2u.

Perjanjian Konsesi Jasa

ISAK 112 menjelaskan pendekatan untuk membukukan perjanjian konsesi jasa akibat dari penyediaan jasa kepada publik. ISAK 112 mengatur bahwa operator (pihak penerima konsesi jasa) tidak membukukan infrastruktur sebagai aset tetap, namun diakui sebagai aset keuangan dan/atau aset takberwujud.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Judgements (continued)

Lease term of contracts with renewal and termination options - the Group as lessee

Further disclosures of leases are made in Note 18.

The key assumptions concerning the future and other key sources of uncertainty of estimation at the reporting date that have a significant risk of causing material adjustments to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Determination of Functional Currency

The functional currency of each entity within the Group is the currency from the primary economic environment where such entity operates. Those currencies are the currencies that mainly influence the revenues, costs and financing of each of the respective entities.

Classification of Financial Assets and Financial Liabilities

The Group determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by complying the definition set forth in PSAK 109. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Group's accounting policies disclosed in Note 2u.

Service Concession Arrangement

ISAK 112 outlines an approach to account for service concession arrangement arising from entities providing public services. ISAK 112 provides that the operator (concession right beneficiary) should not account for the infrastructure as fixed assets, but should recognize a financial asset and/or an intangible asset.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Perjanjian Konsesi Jasa (lanjutan)

Otoritas Pelabuhan ("OP") memberikan hak kepada Perusahaan termasuk hak untuk melaksanakan proyek, hak untuk memasuki, mengakses dan menggunakan area konsesi dengan tujuan melaksanakan proyek dengan tanpa membatasi hak OP dalam menjalankan wewenangnya, sesuai dengan Perjanjian Konsesi dan hukum yang berlaku (Catatan 48).

Pada akhir masa konsesi jasa, Grup harus menyerahkan terminal pelabuhan dan alur pelayaran kepada OP bebas dari setiap bentuk pembebanan, termasuk tanah reklamasi, aset tidak bergerak dan aset bergerak yang secara langsung berkaitan dan berhubungan dengan pengoperasian terminal pelabuhan dan alur pelayaran.

Grup berpendapat bahwa Perjanjian Konsesi memenuhi kriteria sebagai model aset takberwujud, di mana aset konsesi diakui sebagai aset takberwujud sesuai dengan PSAK 238, "Aset Takberwujud".

Grup diharuskan oleh ISAK 112 untuk menyajikan unsur pendapatan yang merefleksikan pendapatan dari jasa konstruksi atas aset konsesi atau peningkatan kemampuan aset konsesi yang dilakukan selama tahun berjalan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Grup mengakui pendapatan dari jasa konstruksi atas aset konsesi masing-masing sebesar dan Rp1.244.807.617 dan Rp2.307.215.142.

Grup mengakui pendapatan konstruksi aset konsesi dan biaya konstruksi atas aset konsesi sesuai dengan PSAK 115.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Judgements (continued)

Service Concession Arrangement (continued)

Port Authority ("OP") granted the rights to the Company, including the right to implement the project, the right to enter, access and use the concession area with the objective of implementing the project without limiting the right of OP in running its authority, in accordance with the Concession Agreement and applicable law (Note 48).

Upon expiry of the service concession period, the Group shall handover the port terminal and shipping channel free of any form of charges, inluding reclamation land, non-removable assets and movable assets there in directly related to, and in connection with, the operation of the port terminal and shipping channel.

The Group has made judgement that the Concession Agreement qualifies under the intangible asset model, wherein the concession asset is recognized as an intangible asset in accordance with PSAK 238, "Intangible Assets".

The Group is required by ISAK 112 to present an element of revenue reflecting revenue from construction services on concession assets or improvements in the capacity of concession assets made during the year in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. For the years ended December 31, 2025 and 2024, the Group recognized revenue from construction services on concession assets of Rp1,244,807,617 and Rp2,307,215,142, respectively.

The Group recognizes construction revenue of concession asset and construction costs of concession asset in accordance with PSAK 115.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Kerugian Kredit Ekpektasian untuk Aset Keuangan

Untuk piutang usaha dan aset kontrak, Grup menerapkan panduan praktis dalam menghitung kerugian kredit ekspektasian. Oleh karena itu, Grup tidak mengidentifikasi perubahan dalam risiko kredit, melainkan mengukur penyisihan kerugian berdasarkan kerugian kredit ekpektasian sepanjang kepemilikan aset pada tanggal pelaporan. Grup telah membentuk matriks provisi yang didasarkan pada data historis kerugian kredit, disesuaikan dengan faktor-faktor perkiraan masa depan (*forward-looking*) khusus terkait pelanggan dan lingkungan ekonomi.

Untuk instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, Grup menerapkan metode yang disederhanakan. Pada setiap tanggal pelaporan, Grup mengevaluasi apakah instrumen utang dianggap memiliki risiko kredit rendah dengan menggunakan semua informasi yang tersedia tanpa biaya atau upaya yang berlebihan. Dalam melakukan evaluasi itu, Grup menilai kembali peringkat kredit eksternal dari instrumen utang. Selain itu, Grup menganggap bahwa telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan ketika pembayaran kontrak lebih dari 30 hari tunggakan.

Grup mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa piutang usaha mengalami penurunan nilai pada setiap akhir periode pelaporan. Provisi atas penurunan nilai piutang usaha dan piutang lain-lain, dihitung berdasarkan kondisi terkini dan tingkat ketertagihan historis piutang usaha. Provisi ini disesuaikan secara berkala untuk mencerminkan hasil aktual dan taksiran. Rincian atas sifat dan jumlah tercatat provisi penurunan nilai piutang diungkapkan pada Catatan 6 dan 7.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Judgements (continued)

Expected Credit Loss for Financial Assets

For trade receivables and contract assets, the Group applies practical guidelines in calculating expected credit losses. Accordingly, the Group does not identify changes in credit risk, but rather measures the allowance for losses based on expected credit losses as long as the assets hold at the reporting date. The Group has established a provisioning matrix based on historical data on credit losses, adjusted for specific forward-looking factors related to customers and the economic environment.

For debt instruments measured at fair value through other comprehensive income, the Group applies the simplified method. At each reporting date, the Group evaluates whether a debt instrument is considered to have low credit risk using all available information without undue cost or effort. In conducting this evaluation, the Group reassesses the external credit rating of the debt instrument. In addition, the Group considers that there has been a significant increase in credit risk when the contract payment is more than 30 days in arrears.

The Group evaluates whether there is objective evidence that trade receivables are impaired at the end of each reporting period. Provision for impairment of trade and other receivables is calculated based on the current condition and historical collectibility of trade receivables. These provisions are adjusted periodically to reflect actual and estimated results. Details of the nature and carrying amount of provision for impairment of receivables are disclosed in Notes 6 and 7.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun.

Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Penyisihan atas Penurunan Nilai Piutang Usaha

Grup menggunakan matriks provisi untuk menghitung ECL atas piutang usaha. Tarif provisi didasarkan pada hari yang lewat jatuh tempo untuk mengelompokan pelanggan ke segmen yang memiliki pola kerugian serupa. Matriks provisi awalnya berdasarkan tarif *default* yang diamati Grup secara historis. Grup akan mengkalibrasi matriks tersebut untuk menyesuaikan pengalaman kerugian kredit historis dengan informasi kedepan. Misalnya, jika prakiraan kondisi ekonomi diperkirakan memburuk selama tahun depan yang dapat menyebabkan peningkatan jumlah *default* di sektor usaha Grup, tingkat *default* historis disesuaikan. Pada setiap tanggal pelaporan, tarif *default* yang diamati secara historis diperbarui dan perubahan dalam estimasi ke depan dianalisa kembali.

Penilaian korelasi antara tingkat *default* yang dapat diamati secara historis, taksiran kondisi ekonomi dan ECL adalah estimasi yang signifikan. Jumlah ECL sensitif terhadap perubahan keadaan dan taksiran kondisi ekonomi. Pengalaman kerugian kredit historis Grup dan perkiraan kondisi ekonomi mungkin juga tidak mewakili aktual *default* pelanggan yang sebenarnya di masa depan.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of uncertainty of estimation at the reporting date that have a significant risk of causing material adjustments to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared.

Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Allowance for Impairment of Trade Receivables

The Group uses a provision matrix to calculate ECLs for trade receivables. The provision rates are based on days past due for groupings of various customer segments that have similar loss patterns. The provision matrix is initially based on the Group's historical observed default rates. The Group will calibrate the matrix to adjust the historical credit loss experience with forward-looking information. For instance, if forecast economic conditions are expected to deteriorate over the next year which can lead to an increased number of defaults in the Group's industry sector, the historical default rates are adjusted. At every reporting date, the historical observed default rates are updated and changes in the forward-looking estimates are analysed.

The assessment of the correlation between historical observed default rates, forecast economic conditions and ECLs is a significant estimate. The amount of ECLs is sensitive to changes in circumstances and of forecast economic conditions. The Group's historical credit loss experience and forecast of economic conditions may also not be representative of customer's actual default in the future.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Estimasi Masa Manfaat Aset Tetap

Masa manfaat dari masing-masing aset tetap Grup diestimasi berdasarkan jangka waktu aset tersebut diharapkan tersedia untuk digunakan. Estimasi tersebut didasarkan pada penilaian kolektif berdasarkan bidang usaha yang sama, evaluasi teknis internal dan pengalaman dengan aset sejenis. Estimasi masa manfaat setiap aset ditelaah secara berkala dan diperbarui jika estimasi berbeda dari perkiraan sebelumnya yang disebabkan karena pemakaian, usang, serta keterbatasan hak atau pembatasan lainnya terhadap penggunaan aset.

Dengan demikian, hasil operasi di masa mendatang mungkin dapat terpengaruh secara signifikan oleh perubahan dalam jumlah dan waktu terjadinya biaya karena perubahan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang disebutkan di atas. Penurunan estimasi masa manfaat ekonomis setiap aset tetap akan menyebabkan kenaikan beban penyusutan dan penurunan nilai tercatat aset tetap.

Estimasi masa manfaat aset tetap diungkapkan pada Catatan 2l.

Penurunan Nilai Aset Non-keuangan

Penelaahan atas penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai aset tertentu. Penentuan nilai wajar aset membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan dan pelepasan akhir atas aset tersebut. Perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar dapat berdampak signifikan pada nilai terpulihkan dan jumlah kerugian penurunan nilai yang terjadi mungkin berdampak material pada hasil operasi Grup.

Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 2h, 2j, 2k, 2l, 2o, 10, 12, 13, 14, 15, 16 dan 19.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Estimate Useful Lifes of Fixed Assets

The useful life of each of the item of the Group's fixed assets is estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on a collective assessment of similar business, internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to usage, obsolescence, and legal or other limits on the use of the asset.

It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above. A reduction in the estimated useful life of any item of fixed assets would increase the recorded depreciation and decrease the carrying values of these assets.

Estimated useful lifes of fixed assets are disclosed in Note 2l.

Impairment of Non-financial Assets

Impairment review is performed when certain impairment indicators are present. Determining the fair value of assets requires the estimation of cash flows expected to be generated from the continued use and ultimate disposition of such assets. Any significant changes in the assumptions used in determining the fair value may materially affect the assessment of recoverable values and any resulting impairment loss could have a material impact on results of the Group's operations.

Further details are disclosed in Notes 2h, 2j, 2k, 2l, 2o, 10, 12, 13, 14, 15, 16 and 19.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Pajak penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya belum dapat dipastikan dalam kegiatan usaha normal. Grup mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi penghasilan kena pajak. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 24.

Aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan liabilitas pada laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak jika besar kemungkinan bahwa jumlah laba fiskal akan memadai untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang diakui. Estimasi manajemen yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang diakui berdasarkan kemungkinan waktu terealisasinya dan jumlah laba fiskal pada masa mendatang serta strategi perencanaan pajak masa depan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 2s dan 24.

Imbalan kerja

Pengukuran liabilitas imbalan kerja Grup bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Keuntungan atau kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial diakui secara langsung pada laporan posisi keuangan konsolidasian dengan debit atau kredit ke saldo laba melalui PKL dalam periode terjadinya.

Manajemen berkeyakinan bahwa asumsi-asumsi yang digunakan adalah tepat dan wajar, namun demikian, perbedaan signifikan pada hasil aktual, atau perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi tersebut dapat berdampak signifikan pada jumlah liabilitas imbalan kerja karyawan. Pada tanggal 31 Desember 2025, saldo liabilitas imbalan kerja karyawan masing-masing sebesar Rp8.100.011.099 (2024: Rp5.772.177.295) (Catatan 30).

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Income tax

Significant judgement is involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Group recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of taxable income. Further details are disclosed in Note 24.

Deferred tax assets

Deferred tax assets are recognized for all temporary differences between the financial statements' carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective taxes bases to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilized. Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of future taxable profits together with future tax planning strategies. Further details are disclosed in Notes 2s and 24.

Employee benefits

The measurement of the Group' employee benefits liability is dependent on its selection of certain assumptions used by the independent actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rates, future annual salary increase, annual employee turn-over rate, disability rate, retirement age and mortality rate. Actuarial gains or losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are recognized immediately in the consolidated statement of financial position with a corresponding debit or credit to retained earnings through OCI the the period in which they occur.

While it is believed that the management's assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual experience or significant changes in assumptions may materially affect the amount of employee benefits liability. As of December 31, 2025, employee benefits liability amounted to Rp8,100,011,099 (2024: Rp5,772,177,295) (Note 30).

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Provisi pemeliharaan aset konsesi

Provisi pemeliharaan aset konsesi ini akan dicadangkan secara berkala berdasarkan estimasi pengeluaran yang diperlukan untuk pemeliharaan sehubungan dengan kewajiban penyerahan aset kepada OP dalam kondisi baik pada akhir masa konsesi.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Provision for concession assets maintenance

Provision for concession assets maintenance will be recorded periodically based on the estimated provision needed for maintenance in relation to the obligation to transfer assets to OP in good condition at the end of concession period.

4. KAS DAN SETARA KAS / *4. CASH AND CASH EQUIVALENTS*

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
Kas	1.401.361	1.710.015	*Cash on hand*
Bank	4.973.640.090	4.354.011.384	*Cash in banks*
Deposito berjangka	10.592.351.253	15.997.222.547	*Time deposits*
Total kas dan setara kas	**15.567.392.704**	**20.352.943.946**	***Total cash and cash equivalents***

a. Kas / *a. Cash on hand*

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
Rupiah	1.401.361	1.710.015	*Rupiah*

b. Bank / *b. Cash in banks*

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
Rupiah:			***Rupiah:***
Pihak ketiga			*Third parties*
PT Bank CIMB Niaga Tbk	43.449.367	219.550.924	*PT Bank CIMB Niaga Tbk*
PT Bank SMBC Indonesia Tbk	39.207.898	27.677.609	*PT Bank SMBC Indonesia Tbk*
PT Bank Central Asia Tbk	38.019.225	64.601.999	*PT Bank Central Asia Tbk*
PT Bank OCBC NISP Tbk	649.344	1.188.931	*PT Bank OCBC NISP Tbk*
PT Bank BCA Syariah	109.169	1.942.434	*PT Bank BCA Syariah*
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	93.993	92.088	*PT Bank Maybank Indonesia Tbk*
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	83.920	2.411.023	*PT Bank Danamon Indonesia Tbk*
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1 miliar)	48.309	40.483	*Others (each below Rp1 billion)*
Pihak berelasi (Catatan 44a)	4.594.353.370	3.716.061.333	*Related parties (Note 44a)*
Sub-total	4.716.014.595	4.033.566.824	*Sub-total*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan) / *4. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)*

b. Bank (lanjutan) / *b. Cash in banks (continued)*

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
Dolar AS:			***US Dollar:***
Pihak ketiga			*Third parties*
PT Bank CIMB Niaga Tbk	1.461.921	1.420.723	*PT Bank CIMB Niaga Tbk*
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1 miliar)	597.575	574.069	*Others (each below Rp1 billion)*
Pihak berelasi (Catatan 44a)	255.565.999	318.449.768	*Related parties (Note 44a)*
Sub-total	257.625.495	320.444.560	*Sub-total*
Total bank	**4.973.640.090**	**4.354.011.384**	***Total cash in banks***

c. Deposito berjangka / *c. Time deposits*

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
Rupiah:			***Rupiah:***
Pihak ketiga			*Third parties*
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	55.000.000	5.000.000	*PT Bank Muamalat Indonesia Tbk*
PT Bank Jabar Banten Syariah	45.000.000	-	*PT Bank Jabar Banten Syariah*
PT Bank Mayapada International Tbk	33.500.000	17.000.000	*PT Bank Mayapada International Tbk*
PT Bank BTPN Syariah Tbk	10.000.000	17.500.000	*PT Bank BTPN Syariah Tbk*
PT Bank KB Bukopin Tbk	10.000.000	5.000.000	*PT Bank KB Bukopin Tbk*
PT Bank SMBC Indonesia Tbk	-	59.000.000	*PT Bank SMBC Indonesia Tbk*
Pihak berelasi (Catatan 44a)	9.563.719.157	9.280.987.996	*Related parties (Note 44a)*
Sub-total	9.717.219.157	9.384.487.996	*Sub-total*
Dolar AS:			***US Dollar:***
Pihak berelasi (Catatan 44a)	875.132.096	6.612.734.551	*Related parties (Note 44a)*
Total deposito berjangka	**10.592.351.253**	**15.997.222.547**	***Total time deposits***

Deposito berjangka yang dijadikan jaminan diklasifikasikan sebagai aset lancar lainnya (Catatan 11).

Time deposits used as collateral are classified as other current assets (Note 11).

Rincian suku bunga tahunan deposito berjangka berdasarkan jenis mata uang adalah sebagai berikut:

The annual interest rates of the above time deposits based on their currency denomination are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Rupiah	2,25% - 7,50%	2,15% - 7,00%	*Rupiah*
Dolar AS	0,22% - 5,92%	1,00% - 6,90%	*US Dollar*

5. INVESTASI JANGKA PENDEK / *5. SHORT-TERM INVESTMENTS*

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
Deposito berjangka			***Time deposits***
Rupiah:			*Rupiah:*
Pihak ketiga	179.832.852	-	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 44b)	70.000.000	52.700.000	*Related parties (Note 44b)*
Dolar AS:			*US Dollar:*
Pihak ketiga	14.400.270	-	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 44b)	-	323.240.000	*Related parties (Note 44b)*
Total deposito berjangka	264.233.122	375.940.000	*Total time deposits*
Efek yang diperdagangkan	-	2.057	*Marketable securities*
Total investasi jangka pendek	**264.233.122**	**375.942.057**	***Total short-term investments***

Deposito berjangka merupakan deposito yang jatuh tempo lebih dari 3 (tiga) bulan tetapi tidak lebih dari 1 (satu) tahun serta tidak dijadikan jaminan.

Time deposits represent deposits with maturities of more than 3 (three) months but not more than 1 (one) year and were not used as collateral.

Deposito berjangka yang dijadikan jaminan diklasifikasikan sebagai aset lancar lainnya (Catatan 11).

Time deposits used as collateral are classified as other current assets (Note 11).

Rincian suku bunga tahunan deposito berjangka berdasarkan jenis mata uang adalah sebagai berikut:

The annual interest rates of the above time deposits based on their currency denomination are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Rupiah	5% - 7,25%	2,25% - 8,30%	*Rupiah*
Dolar AS	4,75%	5,00% - 5,75%	*US Dollar*

Efek yang diperdagangkan merupakan instrumen keuangan dalam bentuk reksadana pasar uang.

Marketable securities represent financial instrument in money market mutual funds.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

6. PIUTANG USAHA / *6. TRADE RECEIVABLES*

a. Berdasarkan pelanggan / *a. By customer*

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
Pihak ketiga			*Third parties*
Difakturkan	1.808.561.147	1.991.155.350	*Billed*
Belum difakturkan	473.359.775	429.723.383	*Unbilled*
Dikurangi:			*Less:*
Penyisihan penurunan nilai	(820.105.587)	(863.536.712)	*Allowance for impairment*
Pihak ketiga - neto	1.461.815.335	1.557.342.021	*Third parties - net*
Pihak berelasi			*Related parties*
Difakturkan	632.321.936	714.831.604	*Billed*
Belum difakturkan	178.166.055	81.984.206	*Unbilled*
Dikurangi:			*Less:*
Penyisihan penurunan nilai	(341.551.862)	(340.995.909)	*Allowance for impairment*
Pihak berelasi - neto (Catatan 44c)	468.936.129	455.819.901	*Related parties - net (Note 44c)*
Total piutang usaha - neto	**1.930.751.464**	**2.013.161.922**	***Total trade receivables - net***

Piutang usaha tidak dijaminkan dan tidak dikenakan bunga.

Trade receivables are unsecured and non-interest bearing.

b. Berdasarkan mata uang / *b. By currency*

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
Rupiah	3.032.026.342	3.161.399.237	*Rupiah*
Dolar AS	60.382.571	56.295.306	*US Dollar*
Total	**3.092.408.913**	**3.217.694.543**	***Total***
Dikurangi:			*Less:*
Penyisihan penurunan nilai	(1.161.657.449)	(1.204.532.621)	*Allowance for impairment*
Neto	**1.930.751.464**	**2.013.161.922**	***Net***

c. Mutasi penyisihan atas penurunan nilai selama periode pelaporan adalah sebagai berikut:

c. Movements in the balance of allowance for impairment during the reporting period are as follows:

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
Saldo awal	1.204.532.621	1.145.789.995	*Beginning balance*
Penyisihan tahun berjalan	4.278.812	73.574.523	*Allowance for the year*
Pemulihan tahun berjalan	(47.153.984)	(14.831.897)	*Recovery for the year*
Saldo akhir	**1.161.657.449**	**1.204.532.621**	***Ending balance***

6. PIUTANG USAHA (lanjutan) / *6. TRADE RECEIVABLES (continued)*

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap adanya penurunan nilai pada akhir tahun, manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan atas penurunan nilai piutang usaha di atas cukup untuk menutup kerugian atas penurunan nilai piutang tersebut.

Based on the results of review for impairment at the end of the year, the management believes that the above allowance for impairment of trade receivables is sufficient to cover losses from impairment of such receivables.

Tabel berikut menyajikan analisis umur piutang usaha.

The following table presents the aging analysis of trade receivables.

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
Belum jatuh tempo	1.050.955.923	1.105.410.175	*Not yet overdue*
Lewat jatuh tempo			*Overdue*
1-90 hari	774.970.358	822.598.879	*1-90 days*
91-180 hari	107.315.716	96.023.747	*91-180 days*
Lebih dari 180 hari	1.159.166.916	1.193.661.742	*More than 180 days*
Sub-total	3.092.408.913	3.217.694.543	*Sub-total*
Dikurangi:			*Less:*
Penyisihan penurunan nilai	(1.161.657.449)	(1.204.532.621)	*Allowance for impairment*
Neto	**1.930.751.464**	**2.013.161.922**	***Net***

7. PIUTANG LAIN-LAIN / *7. OTHER RECEIVABLES*

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
Pihak ketiga			*Third parties*
Swasta	108.167.822	63.855.317	*Private*
Perorangan	4.311.004	15.242.597	*Individuals*
Dikurangi:			*Less:*
Penyisihan penurunan nilai	(55.853.421)	(52.321.485)	*Allowance for impairment*
Pihak ketiga - neto	56.625.405	26.776.429	*Third parties - net*
Pihak berelasi	159.585.856	164.859.275	*Related parties*
Dikurangi:			*Less:*
Penyisihan penurunan nilai	(9.951.038)	(9.951.038)	*Allowance for impairment*
Pihak berelasi - neto (Catatan 44d)	149.634.818	154.908.237	*Related parties - net (Note 44d)*
Piutang lain-lain - neto	**206.260.223**	**181.684.666**	***Other receivables - net***

Mutasi saldo penyisihan penurunan nilai piutang lain-lain adalah sebagai berikut:

The movement in the balance of allowance for impairment of other receivable during the reporting period are as follows:

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
Saldo awal	62.272.523	75.322.674	*Beginning balance*
Penyisihan (pemulihan) tahun berjalan	3.531.936	(13.050.151)	*Allowance (recovery) for the year*
Saldo akhir	**65.804.459**	**62.272.523**	***Ending balance***

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

7. PIUTANG LAIN-LAIN (lanjutan) / *7. OTHER RECEIVABLES (continued)*

Berdasarkan hasil penelaahan keadaan masing-masing piutang pada akhir tahun pelaporan, manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan atas penurunan nilai piutang lain-lain cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang lain-lain.

Based on review of the status of each individual other receivable accounts at the end of the reporting year, the management believes that the allowance for impairment loss is adequate to cover possible losses from uncollectible other receivables.

8. UANG MUKA DAN BIAYA DIBAYAR DI MUKA / *8. ADVANCES AND PREPAID EXPENSES*

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
Uang muka			***Advances***
Operasional	349.751.077	117.284.878	*Operational*
Lain-lain	77.853.780	142.801.455	*Others*
Sub-total	427.604.857	260.086.333	*Sub-total*
Biaya dibayar di muka			***Prepaid expenses***
Kerja sama mitra usaha	86.027.103	93.368.319	*Partnership*
Sewa	11.503.960	6.949.657	*Rental*
Asuransi	10.510.786	24.848.453	*Insurance*
Umum	9.296.705	5.013.972	*General*
Pemeliharaan	7.871.548	10.843.946	*Maintenance*
Pegawai	6.137.287	9.218.194	*Employees*
Lain-lain	2.988.760	3.598.041	*Others*
Sub-total	134.336.149	153.840.582	*Sub-total*
Total	**561.941.006**	**413.926.915**	***Total***

9. ASET KONTRAK / *9. CONTRACT ASSETS*

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
Pihak ketiga	42.821.660	105.072.119	*Third parties*
Dikurangi:			*Less:*
Penyisihan penurunan nilai	-	-	*Allowance for impairment*
Pihak ketiga - neto	42.821.660	105.072.119	*Third parties - net*
Pihak berelasi	194.992.081	174.234.826	*Related parties*
Dikurangi:			*Less:*
Penyisihan penurunan nilai	(318.220)	-	*Allowance for impairment*
Pihak berelasi - neto (Catatan 44e)	194.673.861	174.234.826	*Related parties - net (Note 44e)*
Total aset kontrak - neto	**237.495.521**	**279.306.945**	***Total contract assets - net***

Akun ini merupakan hak bersyarat yang dimiliki Group sehubungan dengan jasa pelayanan kapal, pelayanan non-petikemas, pengusahaan tanah, bangunan, air dan listrik, dan lainnya.

This account represents a conditional right owned by Group in connection with ship services, accrued revenue from ship services, non-container services, land, building, water and electricity services, and others.

Berdasarkan hasil penilaian penurunan nilai pada tahun 2025, manajemen yakin bahwa jumlah penyisihan penurunan nilai cukup untuk menutup kerugian atas aset kontrak.

Based on the results of assesment of impairment at the year 2025, management is confident that the allowance for impairment of contract assets is sufficient to cover losses on contract assets.

10. PERSEDIAAN / *10. INVENTORIES*

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
Suku cadang	252.300.740	230.277.604	*Spareparts*
Bahan bakar	67.706.761	57.378.705	*Fuels*
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp500 juta)	2.854.812	3.052.688	*Others (each below Rp500 million)*
Total	322.862.313	290.708.997	*Total*
Dikurangi:			*Less:*
Penyisihan persediaan usang	(12.661.767)	(12.716.544)	*Allowance for inventory obsolence*
Neto	**310.200.546**	**277.992.453**	***Net***

Mutasi penyisihan persediaan usang adalah sebagai berikut:

The movements are the allowance for inventory obsolescence is as follows:

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
Saldo awal	12.716.544	10.994.431	*Beginning balance*
Penyisihan tahun berjalan	533.160	1.722.113	*Allowance for the year*
Penghapusan selama tahun berjalan	(587.937)	-	*Write-off during the year*
Saldo akhir	**12.661.767**	**12.716.544**	***Ending balance***

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap harga pasar dan kondisi fisik dari persediaan pada tanggal pelaporan, manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan tersebut di atas cukup untuk menutup kemungkinan kerugian dari keusangan dan penurunan nilai persediaan.

Based on a review of the market prices and physical conditions of the inventories at the reporting dates, management believes that the above allowance is adequate to cover any possible lossess from obsolescence and decline in market value of inventories

11. ASET LANCAR LAINNYA / *11. OTHER CURRENT ASSETS*

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya			*Restricted cash and cash equivalents*
Pihak berelasi (Catatan 44f)	1.429.370.043	1.271.319.025	*Related parties (Note 44f)*
Pihak ketiga	2.813.995	306.052	*Third parties*
Sub-total	1.432.184.038	1.271.625.077	*Sub-total*
Giro bank imbalan kerja	46.856.516	48.986.341	*Bank current account for employee benefits*
Lain-lain	76.864.253	22.200.003	*Others*
Total	**1.555.904.807**	**1.342.811.421**	***Total***

11. ASET LANCAR LAINNYA (lanjutan)

Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya terutama merupakan deposito yang dijaminkan kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI") dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI") sehubungan dengan penerbitan *Letter of Credit ("L/C")* untuk keperluan pengadaan *Electric Rubber Tyred Gantry (E-RTG*) dan *Quay Container Crane (QCC)*. Pada tanggal 31 Desember 2025, saldo deposito yang dijaminkan di BNI dan BRI masing-masing sebesar Rp979.000.000 dan Rp450.208.946 (2024: Rp550.000.000 dan Rp718.054.099) (Catatan 44f).

11. OTHER CURRENT ASSETS (continued)

Restricted cash and cash equivalents mainly represent restricted time deposit to PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI") and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI") related to the issuance of Letter of Credit ("L/C") for the procurement purpose of Electric Rubber Tyred Gantry (E-RTG) and Quay Container Crane (QCC). As of December 31, 2025, the outstanding restricted time deposit in BNI and BRI amounting to Rp979,000,000 and Rp450,208,946 (2024: Rp550,000,000 and Rp718,054,099) (Note 44f).

12. INVESTASI JANGKA PANJANG / *12. LONG-TERM INVESTMENT*

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
Investasi pada entitas asosiasi	3.530.134.445	4.049.626.099	*Investment in associates entities*
Investasi pada penyertaan saham	420.072.501	371.206.549	*Investment in share of stocks*
Investasi pada surat utang	546.573.448	591.587.239	*Investment in bonds*
Total	**4.496.780.394**	**5.012.419.887**	***Total***

a. Investasi pada entitas asosiasi / *a. Investment in associates*

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
Metode ekuitas			***Equity method***
BKMS	2.111.992.656	1.806.837.977	*BKMS*
Lain-lain	1.418.141.789	2.242.788.122	*Others*
Total	**3.530.134.445**	**4.049.626.099**	***Total***

	Harga perolehan/ *Cost*	Akumulasi bagian laba (rugi) entitas asosiasi/ *Accumulated equity in net income (loss) of equity in net associates*)*	Penghasilan (rugi) komprehensif lain/*Other comprehensive income (loss) **)*	Nilai tercatat/ *Carrying value*	
31 Desember 2025					***December 31, 2025***
BKMS	800.000.000	1.312.602.291	(609.636)	2.111.992.655	*BKMS*
Lain-lain	830.666.159	(48.385.933)	635.861.564	1.418.141.790	*Others*
Total	**1.630.666.159**	**1.264.216.358**	**635.251.928**	**3.530.134.445**	***Total***
31 Desember 2024					***December 31, 2024***
BKMS	800.000.000	1.017.249.207	(10.411.230)	1.806.837.977	*BKMS*
Lain-lain	830.666.159	794.037.816	618.084.147	2.242.788.122	*Others*
Total	**1.630.666.159**	**1.811.287.023**	**607.672.917**	**4.049.626.099**	***Total***

*) termasuk penerimaan dividen, penurunan nilai dan perubahan lainnya.

**) penyajian penghasilan (rugi) komprehensif lain termasuk selisih kurs penjabaran laporan keuangan.

**) including dividend income, impairment in value and other changes.*

***) presentation of other comprehensive income (loss), including foreign exchange differences arising from the translation of financial statements.*

12. INVESTASI JANGKA PANJANG (lanjutan)

a. Investasi pada entitas asosiasi (lanjutan)

Berikut ini merupakan ringkasan informasi keuangan entitas asosiasi:

12. LONG-TERM INVESTMENT (continued)

a. Investment in associates (continued)

The following is a summary of the financial information of the associate entities:

	Aset/*Assets*	Liabilitas/ *Liabilites*	Pendapatan/ *Revenue*	Laba (rugi)/ *Profit (loss)*	
31 Desember 2025					***December 31, 2025***
BKMS	12.556.693.645	7.285.146.479	2.711.988.604	769.808.525	*BKMS*
Lain-lain	33.100.545.238	29.017.807.742	29.624.403.692	304.816.053	*Others*
31 Desember 2024					***December 31, 2024***
BKMS	11.671.463.308	6.945.349.706	1.364.754.515	522.120.867	*BKMS*
Lain-lain	33.195.290.568	29.053.157.758	29.482.398.726	66.521.648	*Others*

Penerimaan dividen dari investasi entitas asosiasi pada tahun 2025 sejumlah Rp185.531.783 (2024: Rp181.804.647).

Dividend income from the investment in associates for the year 2025 totalling to Rp185,531,783 (2024: Rp181,804,647).

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham LNG No. 3 tanggal 15 Agustus 2025 yang dibuat oleh Notaris Heni Yuniantin, S.H., M.Kn., pemegang saham menyetujui pengurangan modal dasar, pengurangan modal ditempatkan dan modal disetor sehingga modal dasar berubah menjadi Rp148.000.000 dan modal ditempatkan/modal disetor berubah menjadi Rp37.000.000. PMS telah menerima pembayaran tunai sebagai pengembalian atas penyesuaian modal tersebut senilai Rp52.920.000.

Based on the Deed of Statement of Shareholders Decision of LNG No. 3 dated August 15, 2025 of Notary Heni Yuniantin, S.H., M.Kn., the shareholders agreed to reduction of authorized capital as well as the reduction of issued and paid-up capital, whereby the authorized capital was amended to Rp148,000,000 and the issued/paid-up capital was amended to Rp37,000,000 to PMS have received a cash distribution as a return of capital adjustment amounted to Rp52,920,000.

Pada 31 Desember 2025, Grup melakukan pengujian penurunan nilai investasi pada entitas asosiasi NPCT1, yang dimiliki melalui IPC TPK, dengan menggunakan metode *dividend discount model.* Sebagai hasil pengujian, pada tahun berjalan, Grup mengakui provisi penurunan nilai sebesar Rp92.992.278 (Catatan 40).

On December 31, 2025, the Group performed an impairment test on its investment in the associate NPCT1, owned through IPC TPK, using the dividend discount model. As a result of the testing, in the current year, the Group recognized impairment provisions amounting to Rp92,992,278 (Note 40).

b. Investasi pada saham

Investasi pada instrumen ekuitas sebagai NWPKL dan tidak dimiliki untuk diperdagangkan.

b. Investment in share of stock

Investment in equity instruments at FVOCI and are not held for trading.

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
PBM IHC	386.726.292	342.023.639	*PBM IHC*
PT Astra International Tbk	16.750.000	12.250.000	*PT Astra International Tbk*
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	6.721.364	6.911.848	*PT Bank Danamon Indonesia Tbk*
PT Bumi Serpong Damai Tbk	4.149.063	4.332.447	*PT Bumi Serpong Damai Tbk*
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp2 miliar)	5.725.782	5.688.615	*Others (each below Rp2 billion)*
Total	**420.072.501**	**371.206.549**	***Total***

12. INVESTASI JANGKA PANJANG (lanjutan)

12. LONG-TERM INVESTMENT (continued)

c. Investasi pada surat utang

c. Investment in bonds

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
Pemerintah Republik Indonesia	383.730.980	427.705.744	*Government of the Republic Indonesia*
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	54.519.718	53.162.600	*PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)*
PT Integrasi Jaringan Ekosistem	30.954.450	-	*PT Integrasi Jaringan Ekosistem*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	11.352.660	11.051.700	*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk*
PT Angkasa Pura (Persero)	11.082.110	10.450.000	*PT Angkasa Pura (Persero)*
PT Samator Indo Gas Tbk	10.747.560	10.361.000	*PT Samator Indo Gas Tbk*
PT PP (Persero) Tbk	10.446.870	10.000.000	*PT PP (Persero) Tbk*
PT Oki Pulp & Paper Mills	10.305.550	10.122.000	*PT Oki Pulp & Paper Mills*
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	5.336.125	5.155.000	*PT Kereta Api Indonesia (Persero)*
PT Pos Indonesia (Persero)	3.106.281	-	*PT Pos Indonesia (Persero)*
PT Barito Pacific Tbk	3.051.003	2.999.100	*PT Barito Pacific Tbk*
PT Merdeka Gold Copper Tbk	-	10.000.000	*PT Merdeka Gold Copper Tbk*
PT Mora Telematika Indonesia Tbk	-	5.125.000	*PT Mora Telematika Indonesia Tbk*
PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk	-	4.995.000	*PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk*
Lain-lain (dalam Reksadana)	9.906.543	27.480.595	*Others (on Mutual funds)*
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp5 miliar)	2.033.598	2.979.500	*Others (each below Rp5 billion)*
Total	**546.573.448**	**591.587.239**	***Total***

13. PROPERTI INVESTASI

13. INVESTMENT PROPERTIES

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025/ *Year Ended December 31, 2025*					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Harga perolehan						***Acquisition cost***
Tanah	895.222.152	52.394.013	-	759.758.052	1.707.374.217	*Land*
Bangunan fasilitas pelabuhan	783.486.011	-	-	(51.669.099)	731.816.912	*Building and port facilities*
Jalan dan bangunan	161.236.733	-	-	(1.466.063)	159.770.670	*Roads and buildings*
Total	**1.839.944.896**	**52.394.013**	**-**	**706.622.890**	**2.598.961.799**	***Total***
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Bangunan fasilitas pelabuhan	(494.103.789)	(10.665.539)	-	33.903.186	(470.866.142)	*Building and port facilities*
Jalan dan bangunan	(20.709.641)	(1.409.780)	-	1.015.467	(21.103.954)	*Roads and buildings*
Total	**(514.813.430)**	**(12.075.319)**	**-**	**34.918.653**	**(491.970.096)**	***Total***
Dikurangi:						*Less:*
Penyisihan penurunan nilai	(1.526.810)	-	-	-	(1.526.810)	*Allowance for impairment*
Nilai tercatat neto	**1.323.604.656**				**2.105.464.893**	***Net carrying value***

13. PROPERTI INVESTASI (lanjutan) / *13. INVESTMENT PROPERTIES (continued)*

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024/
Year Ended December 31, 2024

	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Harga perolehan						***Acquisition cost***
Tanah	863.566.843	29.291.427	-	2.363.882	895.222.152	*Land*
Bangunan fasilitas pelabuhan	739.347.438	10.790.684	(895.029)	34.242.918	783.486.011	*Building and port facilities*
Jalan dan bangunan	271.611.099	4.545.035	-	(114.919.401)	161.236.733	*Roads and buildings*
Total	**1.874.525.380**	**44.627.146**	**(895.029)**	**(78.312.601)**	**1.839.944.896**	***Total***
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Bangunan fasilitas pelabuhan	(461.946.560)	(27.872.931)	376.127	(4.660.425)	(494.103.789)	*Building and port facilities*
Jalan dan bangunan	(30.325.661)	(2.407.704)	-	12.023.724	(20.709.641)	*Roads and buildings*
Total	**(492.272.221)**	**(30.280.635)**	**376.127**	**7.363.299**	**(514.813.430)**	***Total***
Dikurangi:						*Less:*
Penyisihan penurunan nilai	(1.526.810)	-	-	-	(1.526.810)	*Allowance for impairment*
Nilai tercatat neto	**1.380.726.349**				**1.323.604.656**	***Net carrying value***

Beban penyusutan properti investasi dicatat sebagai bagian dari beban operasi.

Depreciation expenses of investment properties are recorded as part of operating expenses.

Nilai wajar properti investasi pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp44.812.554.957 dan Rp38.145.236.173, yang ditentukan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atas properti investasi.

The fair value of investment properties as of December 31, 2025 and 2024 are calculated amounting to Rp44,812,554,957 and Rp38,145,236,173, respectively, which determined based on Sales Value of Tax Object (NJOP) of the investment properties.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Grup melakukan reklasifikasi sebagai berikut:

As of December 31, 2025 and 2024, the Group do reclassification as follows:

31 Desember 2025 / *December 31, 2025*

Dari akun/*From account*	Menjadi akun/*To account*	Nilai reklasifikasi/ *Reclassification amount*
Aset tetap/*Fixed assets*	Properti investasi/*Investment properties*	809.251.808
Aset dalam penyelesaian - Aset tetap/*Assets under construction - Fixed assets*	Properti investasi/*Investment properties*	3.137.612
Aset kerja sama operasi/Joint operation assets	Properti investasi/*Investment properties*	4.960.306
Properti investasi/*Investment properties*	Aset tetap/*Fixed assets*	(75.808.183)

31 Desember 2024 / *December 31, 2024*

Dari akun/*From account*	Menjadi akun/*To account*	Nilai reklasifikasi/ *Reclassification amount*
Aset tetap/*Fixed assets*	Properti investasi/*Investment properties*	8.809.325
Aset dalam penyelesaian - aset tetap/*Assets under construction - fixed assets*	Properti investasi/*Investment properties*	2.363.882
Properti investasi/*Investment properties*	Aset tetap/*Fixed assets*	(82.122.509)

Perusahaan melakukan penghapusan beberapa properti investasi dengan nilai buku sebesar Rp518.902 di tahun 2024 berdasarkan Surat Menteri BUMN No. S-613/MBU/12/2023 tanggal 8 Desember 2023.

Based on Letter of Minister of SOEs No. S-613/MBU/12/2023 date on December 8, 2023 regarding approval for write-off assets, the Company written-off several investment properties in 2024 with net book value amounting to Rp518,902.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

14. ASET TETAP / *14. FIXED ASSETS*

**Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025/
*Year Ended December 31, 2025***

	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Harga perolehan						***Acquisition costs***
Tanah	3.994.106.570	27.289.000		(505.156.522)	3.516.239.048	*Land*
Bangunan fasilitas pelabuhan	23.845.930.120	13.361.291	(27.005)	664.828.235	24.524.092.641	*Building and port facilities*
Kapal	5.974.190.015	65.403.811	-	20.757.021	6.060.350.847	*Vessels*
Alat fasilitas pelabuhan	17.656.767.211	10.064.093	(180.590.218)	26.456.868	17.512.697.954	*Port facility equipment*
Instalasi fasilitas pelabuhan	3.892.898.417	88.974.140	(207)	(65.509.210)	3.916.363.140	*Port facility installation*
Jalan dan bangunan	7.061.378.962	5.867.745	(2.195.100)	626.466.301	7.691.517.908	*Roads and buildings*
Peralatan	1.687.427.582	24.441.713	(26.017.980)	86.498.733	1.772.350.048	*Equipment*
Kendaraan	186.826.743	620.940	(12.647.996)	(21.832.609)	152.967.078	*Vehicles*
Emplasemen	775.483.770	881.899	-	148.222.393	924.588.062	*Emplacement*
Sub-total	**65.075.009.390**	**236.904.632**	**(221.478.506)**	**980.731.210**	**66.071.166.726**	***Sub-total***
Aset dalam penyelesaian	3.221.414.379	4.496.266.115	(41.590.257)	(2.102.449.635)	5.573.640.602	*Construction in progress*
Total	**68.296.423.769**	**4.733.170.747**	**(263.068.763)**	**(1.121.718.425)**	**71.644.807.328**	***Total***
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Bangunan fasilitas pelabuhan	(7.860.322.797)	(496.831.039)	26.464	219.739.642	(8.137.387.730)	*Building and port facilities*
Kapal	(2.990.313.385)	(345.251.609)	-	10.289.179	(3.325.275.815)	*Vessels*
Alat fasilitas pelabuhan	(10.487.834.440)	(962.821.800)	163.385.550	218.866.896	(11.068.403.794)	*Port facility equipment*
Instalasi fasilitas pelabuhan	(1.686.647.121)	(215.073.724)	203	123.146.062	(1.778.574.580)	*Port facility installation*
Jalan dan bangunan	(2.310.344.643)	(408.102.331)	2.154.867	(254.866.951)	(2.971.159.058)	*Roads and buildings*
Peralatan	(1.349.060.274)	(118.812.170)	25.621.301	89.783.427	(1.352.467.716)	*Equipment*
Kendaraan	(154.533.728)	(6.385.418)	11.184.432	20.880.100	(128.854.614)	*Vehicles*
Emplasemen	(280.491.818)	(50.683.869)	57.880	(66.494.477)	(397.612.284)	*Emplacement*
Total	**(27.119.548.206)**	**(2.603.961.960)**	**202.430.697**	**361.343.878**	**(29.159.735.591)**	***Total***
Dikurangi:						*Less:*
Penyisihan penurunan nilai	(134.038.096)	(87.682.725)	-	-	(221.720.821)	*Allowance for impairment*
Nilai tercatat neto	**41.042.837.467**				**42.263.350.916**	***Net carrying value***

**Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024/
*Year Ended December 31, 2024***

	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Harga perolehan						***Acquisition costs***
Tanah	3.502.233.057	4.418.544	-	487.454.969	3.994.106.570	*Land*
Bangunan fasilitas pelabuhan	22.259.166.192	93.848.675	(22.651.258)	1.515.566.511	23.845.930.120	*Building and port facilities*
Kapal	5.963.691.636	24.589.668	(11.424.921)	(2.666.368)	5.974.190.015	*Vessels*
Alat fasilitas pelabuhan	17.535.428.674	72.659.638	(94.306.717)	142.985.616	17.656.767.211	*Port facility equipment*
Instalasi fasilitas pelabuhan	3.699.853.446	23.830.658	(5.695.724)	174.910.037	3.892.898.417	*Port facility installation*
Jalan dan bangunan	6.588.078.975	37.314.653	(12.921.188)	448.906.522	7.061.378.962	*Roads and buildings*
Peralatan	1.641.820.577	18.342.317	(2.593.804)	29.858.492	1.687.427.582	*Equipment*
Kendaraan	179.988.651	490.951	(3.570.930)	9.918.071	186.826.743	*Vehicles*
Emplasemen	697.783.812	1.208.631	(4.885.221)	81.376.548	775.483.770	*Emplacement*
Sub-total	**62.068.045.020**	**276.703.735**	**(158.049.763)**	**2.888.310.398**	**65.075.009.390**	***Sub-total***
Aset dalam penyelesaian	3.050.083.951	2.686.434.763	(16.443.500)	(2.498.660.835)	3.221.414.379	*Construction in progress*
Total	**65.118.128.971**	**2.963.138.498**	**(174.493.263)**	**389.649.563**	**68.296.423.769**	***Total***
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Bangunan fasilitas pelabuhan	(7.123.280.715)	(757.898.169)	20.690.896	165.191	(7.860.322.797)	*Building and port facilities*
Kapal	(2.724.741.484)	(276.675.671)	11.103.770	-	(2.990.313.385)	*Vessels*
Alat fasilitas pelabuhan	(9.558.065.028)	(1.018.606.773)	88.817.561	19.800	(10.487.834.440)	*Port facility equipment*
Instalasi fasilitas pelabuhan	(1.502.957.937)	(189.731.195)	5.603.664	438.347	(1.686.647.121)	*Port facility installation*
Jalan dan bangunan	(2.013.447.664)	(299.923.509)	9.482.693	(6.456.163)	(2.310.344.643)	*Roads and buildings*
Peralatan	(1.252.520.333)	(103.504.142)	2.566.596	4.397.605	(1.349.060.274)	*Equipment*
Kendaraan	(140.438.262)	(17.395.313)	3.219.515	80.332	(154.533.728)	*Vehicles*
Emplasemen	(251.563.810)	(33.776.495)	4.841.272	7.215	(280.491.818)	*Emplacement*
Total	**(24.567.015.233)**	**(2.697.511.267)**	**146.325.967**	**(1.347.673)**	**(27.119.548.206)**	***Total***
Dikurangi:						*Less:*
Penyisihan penurunan nilai	(37.361.305)	(96.676.791)	-	-	(134.038.096)	*Allowance for impairment*
Nilai tercatat neto	**40.513.752.433**				**41.042.837.467**	***Net carrying value***

14. ASET TETAP (lanjutan)

Beban penyusutan aset tetap dicatat sebagai bagian dari beban operasi.

Grup melakukan penyesuaian umur manfaat aset tetap pada tahun berjalan berdasarkan evaluasi terkini atas kondisi dan pola penggunaan asset yang dilakukan oleh pihak ketiga. Perubahan estimasi tersebut diterapkan secara prospektif. Dampak terhadap beban penyusutan tahun berjalan adalah menambah beban depresiasi sebesar Rp40.113.525 Mengingat variabilitas penggunaan aset dan keterbatasan informasi yang dapat diestimasi secara andal, penyajian proyeksi dampak terhadap beban depresiasi untuk periode mendatang dianggap tidak praktis untuk dilakukan.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Grup mengasuransikan aset tetap sebagai berikut:

14. FIXED ASSETS (continued)

Depreciation expense of fixed assets are recorded as part of operating expenses.

The Group adjusted the useful lives of its fixed assets during the current year based on the latest evaluation of asset conditions and usage patterns performed by a third-party specialist. These revised estimates are applied prospectively. The impact on the current year's depreciation expense is an increase of Rp40,113,525. Given the variability in asset usage and the limited availability of reliably estimable information, presenting projections of depreciation impacts for future periods is considered impracticable.

As of December 31, 2025 and 2024, the Group insured its fixed assets as follows:

31 Desember 2025 / *December 31, 2025*

Perusahaan Asuransi/ ***Insurance Company***	**Risiko Asuransi/** ***Insurable Risk***	**Nilai Pertanggungan Asuransi/*Insurance Coverage Amount***
PT Asuransi Jasaraharja Putera PT BRI Asuransi Indonesia PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) PT Asuransi Tugu Indonesia Hydor	Risiko kebakaran, *property all risk, industrial all risk* dan risiko lainnya/ *Risk of fire, property all risk, industrial all risk and other risks*	Rp41.381.157.925; USD75.000

31 Desember 2024 / *December 31, 2024*

Perusahaan Asuransi/ ***Insurance Company***	**Risiko Asuransi/** ***Insurable Risk***	**Nilai Pertanggungan Asuransi/*Insurance Coverage Amount***
PT Asuransi Jasaraharja Putera PT Asuransi Ramayana Tbk PT MS Amlin PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk	Risiko kebakaran, *property all risk, industrial all risk* dan risiko lainnya/ *Risk of fire, property all risk, industrial all risk and other risks*	Rp46.525.044.432; USD10.000

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari risiko yang diasuransikan.

In management's opinion, the above insurance coverage is adequate to cover any possible losses that may arise from such risks.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

14. ASET TETAP (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Grup melakukan reklasifikasi sebagai berikut:

14. FIXED ASSETS (continued)

As of December 31, 2025 and 2024, the Group do reclassification as follows:

31 Desember 2025 / *December 31, 2025*

Dari akun/*From account*	Menjadi akun/*To account*	Nilai reklasifikasi/*Reclassification amount*
Aset dalam penyelesaian - aset tetap/*Assets under construction - fixed assets*	Properti investasi/*Investment properties*	(3.137.612)
Aset tetap/*Fixed assets*	Properti investasi/*Investment properties*	(809.251.808)
Properti investasi/*Investment properties*	Aset tetap/*Fixed assets*	75.808.183
Aset dalam penyelesaian - aset tetap/*Assets under construction - fixed assets*	Aset kerja sama operasi/*Joint operation assets*	..(12.786.287)
Akumulasi penyusutan aset tetap/*Accumulated depreciation fixed assets*	Akumulasi penyusutan aset kerja sama operasi/*Accumulated depreciation joint operation assets*	271.941
Aset kerja sama operasi/*Joint operation assets*	Aset tetap/*Fixed assets*	53.778
Aset dalam penyelesaian - aset tetap/*Assets under construction - fixed assets*	Aset takberwujud/*Intangible assets*	(82.988.044)
Aset tetap/*Fixed assets*	Aset takberwujud/*Intangible assets*	(1.153.825)
Aset kontrak konsesi/*Concession contractual asset*	Aset tetap/*Fixed assets*	76.832.062
Aset takberwujud/*Intangible assets*	Aset tetap/*Fixed assets*	9.751.644
Aset tetap/*Fixed assets*	Aset tetap tersedia dijual/*Fixed assets available to sale*	(259.396)
Aset tetap/*Fixed assets*	Aset tetap tidak produktif/*Fixed assets not productive*	(13.515.183)

31 Desember 2024 / *December 31, 2024*

Dari akun/*From account*	Menjadi akun/To account	Nilai reklasifikasi/*Reclassification amount*
Properti investasi/*Investment properties*	Aset tetap/*Fixed assets*	82.122.510
Aset tetap tersedia dijual/*Fixed assets available to sale*	Aset tetap/Fixed assets	663.829
Aset dalam penyelesaian - aset takberwujud/*Assets under construction - intangible assets*	Aset dalam penyelesaian - aset tetap/*Assets under construction - fixed assets*	311.170.616
Aset tetap/*Fixed assets*	Properti investasi/*Investment properties*	(8.809.325)
TotAset dalam penyelesaian - aset tetap/*Assets under construction - fixed assets*	Aset takberwujud/*Intangible assets*	(63.213.799)
Aset tetap/*Fixed assets*	Aset tetap tidak produktif/*Fixed assets not productive*	(2.216.914)
Aset tetap/*Fixed assets*	Aset tidak lancar lainnya - beban tangguhan/*Other non-current assets - deferred charges*	(3.255.606)
Aset dalam penyelesaian - aset tetap/*Assets under construction - fixed assets*	Aset tidak lancar lainnya - beban tangguhan/*Other non-current assets - deferred charges*	(4.757.242)
Aset dalam penyelesaian - aset tetap/*Assets under construction - fixed assets*	Aset kerja sama operasi/*Joint operation assets*	(33.931.976)
Aset dalam penyelesaian – aset tetap/*Assets under construction - fixed assets*	Properti investasi/*Investment properties*	(2.363.883)
Aset kontrak konsesi/*Concession contractual asset*	Aset tetap/*Fixed assets*	112.893.680

14. ASET TETAP (lanjutan) / *14. FIXED ASSETS (continued)*

Penjualan dan Penghapusan Aset Tetap / *Sale and Write-off of Fixed Assets*

Pada tahun 2025 dan 2024, Grup menjual dan menghapusbukukan beberapa aset tetap dengan rincian sebagai berikut:

In 2025 and 2024, the Group sold and written-off several fixed assets with details as follows:

Tahun 2025/*Year 2025*

Penjualan aset tetap/*Sale of fixed assets*

Entitas/*Entity*	Nilai pelepasan/*Sales value*	Nilai buku/*Book value*	Laba (rugi) penjualan/*Gain (loss) on sales*	Persetujuan pemegang saham/Dewan Komisaris/*Shareholders/Board of Commissioners Approval*
Perusahaan/ *The Company*	12.492.970	10.832.188	1.660.782	No. S-671/MBU/12/2024 tanggal 24 Desember 2024/ *dated December 24, 2024* No. 15/DK/PI.II-2025 tanggal 18 Februari 2025/ *dated February 18, 2025*
SPMT	15.180.711	858.393	14.322.318	No.KU.02.08/2/7/1/PBDH/DIKS/PTP-25 tanggal 30 Juni 2025/ *dated June 30, 2025* No. DK/03/07/02/IPCC-25 tanggal 3 Juli 2025/ *dated July 3, 2025* No. SK.03/14/10/2/PAPS/DIRU/PLMT-24 & SK.03/14/10/1/DHKP/DIRU/PII-24 tanggal 14 Oktober 2025/ *dated October 14, 2025*
SPJM	50.450	14.470	35.980	No. RT.01.02/17/1/1/SDUM/SDUM-24, SK.03/30/1/9/PMAP/DRUT/PLJM-24 tanggal 30 January 2024/ *dated January 30, 2024*
PMLI	66.667	135.846	(69.179)	No. LG.05/001/DK.0921/PDS-2021 tanggal 23 September 2021 *dated September 23, 2021*
Total	**27.790.798**	**11.840.897**	**15.949.901**	

Penghapusan aset tetap/*Write-off of fixed assets*

Entitas/*Entity*	Nilai buku/*Book value*	Rugi penghapusan/ *Loss on disposals*	Persetujuan pemegang saham/Dewan Komisaris/*Shareholders/Board of Commissioners Approval*
Perusahaan/ *The Company*	775	775	No. KU.02.08/12/6/1/ASTA/ED2.2-25 tanggal 12 Juni 2025/*dated June 12, 2025*
SPTP	7.197.696	7.197.696	No. SK.03/10/11/12/2/PAPU/DRTU/PLTP-25, No. 72.1/KEPSIR/KP/XI-2025 tanggal 10 November 2025/*dated November 10, 2025*
PMLI	8.441	8.441	No. IS.02/001/DK.0925/PDS-2025 tanggal 24 September 2025/*dated September 24, 2025*
Total	**7.206.912**	**7.206.912**	

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

14. ASET TETAP (lanjutan)

Penjualan dan Penghapusan Aset Tetap (lanjutan)

Pada tahun 2025 dan 2024, Grup menjual dan menghapusbukukan beberapa aset tetap dengan rincian sebagai berikut: (lanjutan)

14. FIXED ASSETS (continued)

Sale and Write-off of Fixed Assets (continued)

In 2025 and 2024, the Group sold and written-off several fixed assets with details as follows: (continued)

Tahun 2025 (lanjutan)/*Year 2025 (continued)*

Penghapusan aset dalam penyelesaian/*Write-off of construction in progress*

Entitas/*Entity*	Nilai buku/*Book value*
Perusahaan/ *The Company*	3.811.951
SPTP	36.977.906
SPMT	800.400
Total	**41.590.257**

Tahun 2024/*Year 2024*

Penjualan aset tetap/*Sale of fixed assets*

Entitas/*Entity*	Nilai pelepasan/*Sales value*	Nilai buku/*Book value*	Laba (rugi) penjualan/*Gain (loss) on sales*	Persetujuan pemegang saham/Dewan Komisaris/*Shareholders/Board of Commissioners Approval*
Perusahaan/ *The Company*	13.424.383	7.333.891	6.090.491	No. KU.02.08/27/5/1/ASTA/ED1.1-24 tanggal 27 April 2024/ *dated April 27, 2024* No. S-613/MBU/12/2023 tanggal 8 Desember 2023/ *dated December 8, 2023* No. 100/DK/PI/XII-2022 tanggal 19 Desember 2022/ *dated December 19, 2022*
SPJM	548.039	182.367	365.672	No. RT.01.02/17/1/1/SDUM/SDUM-24 tanggal 17 Januari 2024/ *dated January 17, 2024* No. SK.03/30/1/9/PMAP/DRUT/PLJM-24 tanggal 30 Januari 2024/ *dated January 30, 2024*
SPSL	554.762	627.721	(72.959)	No. PP.01/8/11/1/DIUT/PMP-24 tanggal 8 November 2024/ *dated November 8, 2024* No. 04/11/TK-5/DK-PMP/2024 tanggal 14 November 2024/ *dated November 14, 2024*
EDII	4.286.907	3.040.919	1.245.987	No. KS-045/LEG/SISTEK-PELINDO/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022/ *dated December 9, 2022* No. SK.03/9/12/1/PBAN/UTMA/PLND-22 tanggal 9 Desember 2022/ *dated December 9, 2022*
Total	**18.814.091**	**11.184.898**	**7.629.191**	

14. ASET TETAP (lanjutan) / *14. FIXED ASSETS (continued)*

Penjualan dan Penghapusan Aset Tetap (lanjutan) / ***Sale and Write-off of Fixed Assets (continued)***

Pada tahun 2025 dan 2024, Grup menjual dan menghapusbukukan beberapa aset tetap dengan rincian sebagai berikut: (lanjutan) / *In 2025 and 2024, the Group sold and written-off several fixed assets with details as follows: (continued)*

Tahun 2024 (lanjutan)/*Year 2024 (continued)*

Penghapusan aset tetap/*Write-off of fixed assets*

Entitas/*Entity*	Nilai buku/*Book value*	Rugi penghapusan/ *Loss on disposals*	Persetujuan pemegang saham/Dewan Komisaris/*Shareholders/Board of Commissioners Approval*
Perusahaan/ *The Company*	418.543	418.543	No. KU.02.08/8/8/1/ASTA/ED1.1-24 tanggal 8 Agustus 2024/*dated August 8, 2024* No. KU.02.08/7/12/ASTA/ED1.1-24 tanggal 7 Desember 2024/*dated December 7, 2024* No: S-613/MBU/12/2023 tanggal 8 Desember 2023/*dated December 8, 2023* No. 100/DK/PI/XII-2022 tanggal 19 Desember 2022/*dated December 19, 2022*
SPTP	12.900	12.900	No. KU.03.02/4/6/1/BRAK/BRDU/BJTI-24 tanggal 4 Juni 2024/*dated June 4, 2024*
SPJM	82.499	82.499	No. RT.01.02/17/1/1/SDUM/SDUM-24, 3/DK/X/EII-23 tanggal 4 April 2024/*dated April 4, 2024* No. SK.03/30/1/9/PMAP/DRUT/PLJM-24 tanggal 30 Januari 2024/*dated January 30, 2024* No. SK.03/5/1/2/SKPU/SKPU/PMS-24 tanggal 5 Januari 2024/*dated January 5, 2024* No. SK.03/5/1/1/BRAK/BRDU/BJTI-24 tanggal 5 Januari 2024/*dated January 5, 2024* No. KU.202/14/5/1/PERP/DRUT/PLJM-24 tanggal 14 Mei 2024/*dated May 14, 2024*
EDII	24.956	24.956	No. KS-045/LEG/SISTEK-PELINDO/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022/*dated December 9, 2022* No. SK.03/9/12/1/PBAN/UTMA/PLND-22 tanggal 9 Desember 2022/*dated December 9, 2022*
Total	**538.898**	**538.898**	

Penghapusan aset dalam penyelesaian/*Write-off of construction in progress*

Entitas/*Entity*	Nilai buku/*Book value*
Perusahaan/ *The Company*	14.845.490
SPTP	533.391
SPMT	1.064.619
Total	**16.443.500**

14. ASET TETAP (lanjutan) / *14. FIXED ASSETS (continued)*

Aset dalam Penyelesaian / *Construction in Progress*

Aset dalam penyelesaian terdiri dari: / *Construction in progress consists of:*

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
Bangunan fasilitas pelabuhan	2.249.314.953	1.608.175.142	*Building and port facilities*
Alat fasilitas pelabuhan	2.204.951.661	829.718.723	*Port equipment*
Peralatan	450.179.548	208.608.413	*Equipment*
Jalan dan bangunan	168.769.334	128.568.457	*Roads and buildings*
Instalasi fasilitas pelabuhan	132.185.883	198.977.881	*Port facility installation*
Kapal	54.857.089	62.160.316	*Vessels*
Emplasemen	9.814.869	6.531.052	*Emplacement*
Lainnya	303.567.265	178.674.395	*Others*
Total	**5.573.640.602**	**3.221.414.379**	***Total***

Persentase penyelesaian dan taksiran jangka waktu penyelesaian atas aset dalam penyelesaian yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

The percentages of completion and estimated completion periods of significant construction in progress as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

31 Desember 2025 / *December 31, 2025*

Jenis aset	Persentase penyelesaian/ *Percentage of completion*	Target penyelesaian/ *Target of completion*	*Type of assets*
Pekerjaan peninggian, perkuatan, dan pendalaman dermaga	57,58%	2026	*Elevation, reinforcement and dredging of dock project*
Pekerjaan pembangunan kapal	-	-	*Construction of ship*
Pekerjaan perkuatan lapangan Penumpukan	2,00% - 49,84%	2026	*Construction of yard*
Bangunan dan alat fasilitas pelabuhan	8,82% - 95,00%	2026 - 2027	*Building and port equipment facilities*
Instalasi fasilitas pelabuhan	50,00% - 98,00%	2026	*Port facility installation*
Jalan dan bangunan	8,76% - 98,00%	2026 - 2027	*Roads and buildings*

31 Desember 2024 / *December 31, 2024*

Jenis aset	Persentase penyelesaian/ *Percentage of completion*	Target penyelesaian/ *Target of completion*	*Type of assets*
Pekerjaan peninggian, perkuatan, dan pendalaman dermaga	67,00%	2025	*Elevation, reinforcement and dredging of dock project*
Pekerjaan pembangunan kapal	20,00% - 57,41%	2025 - 2026	*Construction of ship*
Pekerjaan perkuatan lapangan penumpukan	65,00%	2025	*Construction of yard*
Bangunan dan alat fasilitas pelabuhan	2,00% - 95,70%	2025 - 2027	*Building and port equipment facilities*
Instalasi fasilitas pelabuhan	5,00% - 98,00%	2025	*Port facility installation*
Jalan dan bangunan	2,00% - 90,00%	2025 - 2027	*Roads and buildings*

Biaya perolehan aset dalam penyelesaian tersebut di atas termasuk beban pinjaman yang dikapitalisasi masing-masing sebesar RpNihil dan Rp37.349.708 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Cost of construction in progress includes capitalized borrowing cost amounting to RpNil and Rp37,349,708 for the years ended December 31, 2025 and 2024, respectively.

15. ASET KERJA SAMA OPERASI

Aset kerja sama operasi merupakan aset yang diserahkan untuk dikelola oleh TPK Koja dan MKO MTKI masing-masing berdasarkan perjanjian kontraktual dengan PT Hutchison Ports Indonesia (Catatan 49d) dan PT Maspion Industrial Estate, dengan rincian sebagai berikut:

15. JOINT OPERATION ASSETS

Jointly controlled assets represent assets that are transferred to be managed by TPK Koja and MKO MTKI based on contractual agreement with PT Hutchison Ports Indonesia (Note 49d) and PT Maspion Industrial Estate, respectively, with details as follow:

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025/
Year ended December 31, 2025

	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Harga perolehan						***Acquisition cost***
Tanah	4.960.306	-	-	(4.960.306)	-	*Land*
Bangunan fasilitas pelabuhan	800.418.612	-	-	-	800.418.612	*Building and port facilities*
Alat fasilitas pelabuhan	93.046.361	-	-	12.786.287	105.832.648	*Port equipment*
Instalasi fasilitas pelabuhan	10.504.447	4.653.073	-	-	15.157.520	*Port facility installation*
Jalan dan bangunan	2.076.804	-	-	(105.305)	1.971.499	*Roads and buildings*
Peralatan	1.535.821	-	-	-	1.535.821	*Equipment*
Emplasemen	4.530.520	-	-	-	4.530.520	*Emplacement*
Total	**917.072.871**	**4.653.073**	**-**	**7.720.676**	**929.446.620**	***Total***
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Bangunan fasilitas pelabuhan	(464.124.061)	(12.691.953)	-	-	(476.816.014)	*Building and port facilities*
Alat fasilitas pelabuhan	(74.431.941)	(2.396.122)	-	-	(76.828.063)	*Port equipment*
Instalasi fasilitas pelabuhan	(5.398.624)	(878.008)	-	-	(6.276.632)	*Port facility installation*
Jalan dan bangunan	(1.695.795)	(13.186)	-	51.528	(1.657.453)	*Roads and buildings*
Peralatan	(1.505.107)	-	-	-	(1.505.107)	*Equipment*
Emplasemen	(1.598.364)	(177.596)	-	-	(1.775.960)	*Emplacement*
Total	**(548.753.892)**	**(16.156.865)**	**-**	**51.528**	**(564.859.229)**	***Total***
Dikurangi:						*Less:*
Penyisihan penurunan nilai	(60.467)	-	-	-	(60.467)	*Allowance for impairment*
Nilai tercatat neto	**368.258.512**				**364.526.924**	***Net carrying value***

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024/
Year ended December 31, 2024

	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Harga perolehan						***Acquisition cost***
Tanah	4.960.306	-	-	-	4.960.306	*Land*
Bangunan fasilitas pelabuhan	772.669.489	-	-	27.749.123	800.418.612	*Building and port facilities*
Alat fasilitas pelabuhan	86.424.759	-	-	6.621.602	93.046.361	*Port equipment*
Instalasi fasilitas pelabuhan	10.504.447	-	-	-	10.504.447	*Port facility installation*
Jalan dan bangunan	2.515.554	-	-	(438.750)	2.076.804	*Roads and buildings*
Peralatan	1.535.821	-	-	-	1.535.821	*Equipment*
Emplasemen	4.530.520	-	-	-	4.530.520	*Emplacement*
Total	**883.140.896**	**-**	**-**	**33.931.975**	**917.072.871**	***Total***
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Bangunan fasilitas pelabuhan	(443.290.183)	(20.607.261)	-	(226.617)	(464.124.061)	*Building and port facilities*
Alat fasilitas pelabuhan	(70.872.636)	(2.998.881)	-	(560.424)	(74.431.941)	*Port equipment*
Instalasi fasilitas pelabuhan	(5.456.466)	(323.210)	-	381.052	(5.398.624)	*Port facility installation*
Jalan dan bangunan	(1.625.441)	(119.277)	-	48.923	(1.695.795)	*Roads and buildings*
Peralatan	(1.505.107)	-	-	-	(1.505.107)	*Equipment*
Emplasemen	(1.420.768)	(177.596)	-	-	(1.598.364)	*Emplacement*
Total	**(524.170.601)**	**(24.226.225)**		**(357.066)**	**(548.753.892)**	***Total***
Dikurangi:						*Less:*
Penyisihan penurunan nilai	(60.467)	-	-	-	(60.467)	*Allowance for impairment*
Nilai tercatat neto	**358.909.828**				**368.258.512**	***Net carrying value***

15. ASET KERJA SAMA OPERASI (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Grup melakukan reklasifikasi sebagai berikut:

15. JOINT OPERATION ASSETS (continued)

As of December 31, 2025 and 2024, the Group do reclassification as follows:

31 Desember 2025 / *December 31, 2025*

Dari akun/*From account*	Menjadi akun/To account	Nilai reklasifikasi/*Reclassification amount*
Aset kerja sama operasi/*Joint operation assets*	Properti investasi/*Investment properties*	(4.960.306)
Aset dalam penyelesaian – aset tetap/*Assets under construction - fixed assets*	Aset kerja sama operasi/*Joint operation assets*	12.786.287
Aset kerja sama operasi/*Joint operation assets*	Aset tetap/*Fixed assets*	(53.777)

31 Desember 2024 / *December 31, 2024*

Dari akun/*From account*	Menjadi akun/To account	Nilai reklasifikasi/*Reclassification amount*
Aset tetap/*Fixed assets*	Aset kerja sama operasi/*Joint operation assets*	33.574.909

16. ASET TAKBERWUJUD

16. INTANGIBLE ASSETS

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
Aset hak konsesi			***Concession rights assets***
Harga perolehan	46.023.038.958	45.671.304.632	*Acquisition cost*
Akumulasi amortisasi dan penyisihan penurunan nilai	(3.735.753.806)	(2.832.558.750)	*Accumulated amortization allowance for impairment*
Aset hak konsesi, neto	**42.287.285.152**	**42.838.745.882**	***Concession rights assets, net***
Aset takberwujud lainnya			***Other intangible assets***
Piranti lunak	1.952.437.857	1.776.990.940	*Software*
Lisensi	93.911.740	93.663.240	*License*
Lainnya	141.369.066	148.711.233	*Others*
Aset dalam penyelesaian	283.808.339	219.478.276	*Construction in progress*
Sub-total	2.471.527.002	2.238.843.689	*Sub-total*
Akumulasi amortisasi dan penyisihan penurunan nilai	(1.861.656.967)	(1.554.360.954)	*Accumulated amortization allowance for impairment*
Aset takberwujud lainnya, neto	**609.870.035**	**684.482.735**	***Others intangible assets, net***
Neto	**42.897.155.187**	**43.523.228.617**	***Net***

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, aset takberwujud tidak dijaminkan.

As of December 31, 2025 and 2024, intangible assets are not pledged as collateral.

Aset hak konsesi

Aset hak konsesi merupakan aset yang dibangun berdasarkan hak yang diberikan oleh Otoritas Pelabuhan kepada Perusahaan untuk membangun dan mengoperasikan terminal pelabuhan dan jalan tol Cibitung - Cilincing berdasarkan Perjanjian Konsesi (Catatan 48a).

Concession rights assets

Concession rights assets represent assets which were constructed based on the right granted by Port Authority to the Company to develop and operate port terminal and the Cibitung - Cilincing toll road based on Concession Agreement (Note 48a).

16. ASET TAKBERWUJUD (lanjutan) / *16. INTANGIBLE ASSETS (continued)*

Aset hak konsesi (lanjutan) / ***Concession rights assets (continued)***

Pada tanggal 31 Desember 2025, PMT melakukan kajian atas indikasi penurunan nilai atas aset konsesi sesuai dengan PSAK 236 dan mengidentifikasi indikator penurunan nilai untuk UPK Terminal Kuala Tanjung.

On December 31, 2025, PMT performed an assessment for indications of impairment of concession right assets in accordance with PSAK 236 and identified impairment indicators for ther CGU of the Kuala Tanjung Terminal.

Berdasarkan pengujian penurunan nilai, nilai tercatat pada Terminal Kuala Tanjung lebih tinggi daripada nilai terpulihkannya. Oleh karena itu, PMT mengakui kerugian penurunan nilai sebesar Rp332.386.976. Pengukuran jumlah terpulihkan ditentukan berdasarkan *value in use* dengan menggunakan model arus kas yang didiskontokan.

Based on the impairment assessment, the carrying value of the Kuala Tanjung Terminal exceeds their receivable amount. Consequently, PMT recognizes an impairment loss of Rp332,386,976. The measurement of recoverable amount was determined based on value in use using a discounted cash flow model.

Piranti lunak / ***Software***

Piranti lunak merupakan biaya yang telah dikeluarkan untuk pengembangan aplikasi *Port Wide Solution* untuk pelayanan *car terminal*, *container terminal* dan pergudangan beserta *Annual Technical Support (ATS)* dan *change request*, aplikasi piranti lunak yang berlisensi yang digunakan untuk proses pertukaran data secara elektronik *(electronic data interchange)*, aplikasi bidang operasional, ERP (sistem informasi keuangan, personalia, dan teknik), pengembangan *Port Community System/Inaportnet*, aplikasi *dash board system* untuk menyajikan informasi mengenai performansi operasional, integrasi antar sistem, integrasi *autogate* dan VGM untuk sistem operasi terminal.

Software application represents cost incurred for the development of Port Wide Solution application for car terminal services, container terminal services and warehouse and Annual Technical Support (ATS) and change request, licensed software application used for electronic data interchange, operational application, ERP (finance, human resources, and technical information system), development of Port Community System/ Inaportnet, dash board system application to present information regarding operational performance, system integration, autogate integration and VGM for terminal operating system.

17. ASET KONTRAK KONSESI / *17. CONCESSION CONTRACTUAL ASSETS*

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
Aset dalam penyelesaian - hak konsesi	6.635.265.469	5.281.379.972	*Construction in progress - concession rights*

Aset kontrak konsesi merupakan aset dalam penyelesaian atas aset hak konsesi yang dibangun berdasarkan perjanjian konsesi yang dimiliki Perusahaan (Catatan 48a).

Concession contractual assets represent construction in progress of consession rights assets which build based on Concession Agreement held by the Company (Note 48a).

17. ASET KONTRAK KONSESI (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, persentase rata-rata penyelesaian pembangunan terminal pelabuhan masih dalam konstruksi adalah sebagai berikut:

Terminal Pelabuhan/ *Port Terminal*	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*
Kalibaru	94,72%	88,90%
Kijing	97,14%	48,24%

Biaya pinjaman yang dikapitalisasi dalam aset hak konsesi pembangunan terminal pelabuhan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Terminal Pelabuhan/ *Port Terminal*	2025	2024
Kalibaru	277.228.177	278.149.753
Kijing	112.183.638	112.064.317
Gresik	1.676.221	-

Berdasarkan penelaahan oleh manajemen Grup, tidak terdapat kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset kontrak konsesi pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

17. CONCESSION CONTRACTUAL ASSETS (continued)

As of December 31, 2025 and 2024, the average percentage completion of port under construction are as follows:

Borrowing costs capitalized for the concession assets of port terminal for the year ended December 31, 2025 and 2024 are as follows:

Based on the Group management's review, there were no events or changes in circumtances which indicated impairment in the value of concession contractual assets as of December 31, 2025 and 2024.

18. ASET HAK-GUNA DAN LIABILITAS SEWA

Mutasi aset hak-guna adalah sebagai berikut:

18. RIGHT-OF-USE ASSETS AND LEASE LIABILITIES

The movements in right-of-use assets are as follows:

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025/ *Year ended December 31, 2025*

	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Harga perolehan						***Acquisition costs***
Tanah	156.855.775	-	(217.751)	124.755.323	281.393.347	*Lands*
Bangunan fasilitas pelabuhan	289.809.431	21.681.543	(38.229.662)	(19.291.281)	253.970.031	*Port facilities*
Kapal	648.129.563	248.828.180	(65.654.303)	-	831.303.440	*Vessels*
Alat fasilitas pelabuhan	1.840.743	4.423.230	(4.423.230)	-	1.840.743	*Port equipment*
Peralatan	4.436.155	6.761.313	(194.937)	-	11.002.531	*Equipments*
Kendaraan	77.364.597	35.446.215	(28.949.135)	18.969.318	102.830.995	*Vehicles*
Sub-total	**1.178.436.264**	**317.140.481**	**(137.669.018)**	**124.433.360**	**1.482.341.087**	***Sub-total***
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Tanah	(10.453.039)	(8.975.483)	-	-	(19.428.522)	*Lands*
Bangunan fasilitas pelabuhan	(99.820.945)	(13.602.406)	33.170.853	19.260.877	(60.991.621)	*Port facilities*
Kapal	(218.411.929)	(328.531.803)	41.307.951	-	(505.635.781)	*Vessels*
Alat fasilitas pelabuhan	(1.840.743)	(4.423.230)	4.423.230	-	(1.840.743)	*Port equipment*
Peralatan	(3.305.196)	(2.578.927)	104.896	-	(5.779.227)	*Equipments*
Kendaraan	(58.381.876)	(11.845.610)	27.770.915	(18.969.318)	(61.425.889)	*Vehicles*
Sub-total	**(392.213.728)**	**(369.957.459)**	**106.777.845**	**291.559**	**(655.101.783)**	***Sub-total***
Nilai tercatat neto	**786.222.536**				**827.239.304**	***Net carrying value***

18. ASET HAK-GUNA DAN LIABILITAS SEWA (lanjutan)

Mutasi aset hak-guna adalah sebagai berikut: (lanjutan)

18. RIGHT-OF-USE ASSETS AND LEASE LIABILITIES (continued)

The movements in right-of-use assets are as follows: (continued)

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024/
Year ended December 31, 2024

	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Harga perolehan						***Acquisition costs***
Tanah	156.855.775	-	-	-	156.855.775	*Lands*
Bangunan fasilitas pelabuhan	257.523.367	122.284.787	(89.556.361)	(442.362)	289.809.431	*Port facilities*
Kapal	167.568.556	614.987.267	(134.426.260)	-	648.129.563	*Vessels*
Alat fasilitas pelabuhan	5.154.195	1.367.590	(4.681.042)	-	1.840.743	*Port equipment*
Peralatan	6.142.286	601.441	(2.157.847)	(149.725)	4.436.155	*Equipments*
Kendaraan	99.773.246	12.310.009	(32.518.183)	(2.200.475)	77.364.597	*Vehicles*
Sub-total	**693.017.425**	**751.551.094**	**(263.339.693)**	**(2.792.562)**	**1.178.436.264**	***Sub-total***
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Tanah	(8.165.459)	(2.287.580)	-	-	(10.453.039)	*Lands*
Bangunan fasilitas pelabuhan	(101.450.018)	(22.824.914)	24.011.625	442.362	(99.820.945)	*Port facilities*
Kapal	(52.026.179)	(300.805.065)	134.419.315	-	(218.411.929)	*Vessels*
Alat fasilitas pelabuhan	(10.060.096)	(4.681.042)	12.900.395	-	(1.840.743)	*Port equipment*
Peralatan	(2.176.265)	(1.726.495)	447.839	149.725	(3.305.196)	*Equipment*
Kendaraan	(64.886.302)	(25.889.788)	30.193.739	2.200.475	(58.381.876)	*Vehicles*
Sub-total	**(238.764.319)**	**(358.214.884)**	**201.972.913**	**2.792.562**	**(392.213.728)**	***Sub-total***
Nilai tercatat neto	**454.253.106**				**786.222.536**	***Net carrying value***

Rincian liabilitas sewa adalah sebagai berikut:

The detail of lease liabilities is as follows:

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
Liabilitas sewa			*Lease liabilities*
Bagian jangka pendek	363.576.600	134.702.846	*Current portion*
Bagian jangka panjang	442.519.425	775.556.684	*Long-term portion*
Total	**806.096.025**	**910.259.530**	***Total***

Jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

Amounts recognized on the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Beban penyusutan aset hak-guna	368.850.392	264.849.851	*Depreciation of right-of-use assets*
Bunga atas liabilitas sewa	63.641.831	53.787.606	*Interest on lease liabilities*
Total	**432.492.223**	**318.637.457**	***Total***

18. ASET HAK-GUNA DAN LIABILITAS SEWA (lanjutan)

Grup mempunyai arus kas keluar untuk sewa sebesar Rp585.313.070 (2024: Rp185.720.560), termasuk beban bunga sebesar Rp73.571.484 (2024: Rp41.602.494).

Beberapa transaksi sewa mengandung opsi perpanjangan yang dapat diambil oleh Grup sebelum masa berakhirnya kontrak yang tidak dapat dibatalkan. Opsi perpanjangan yang dimiliki hanya dapat diambil oleh Grup. Grup mengevaluasi pada awal dimulainya masa sewa apakah besar kemungkinan akan diambilnya opsi perpanjangan. Grup mengevaluasi kembali penentuan ini apabila ada peristiwa signifikan atau ada perubahan keadaan signifikan di dalam kendali Grup.

Ringkasan komponen perubahan liabilitas yang timbul dari sewa adalah sebagai berikut:

18. RIGHT-OF-USE ASSETS AND LEASE LIABILITIES (continued)

The Group had total cash outflows for leases of Rp585,313,070 (2024: Rp185,720,560), including interest expenses of Rp73,571,484 and (2024: Rp41,602,494).

Some leases contain extension options exercisable by the Group before the end of the non-cancellable contract period. The extension options held are exercisable only by the Group. The Group assesses at lease commencement whether it is reasonably certain to exercise the extension options. The Group reassesses this assessment if there is a significant event or significant change in circumstances within its control.

Summary of component of changes in the liabilities arising from leases is as folllow:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Liabilitas sewa			*Lease liabilities*
Saldo awal	910.259.530	487.723.464	*Beginning balance*
Penambahan selama tahun berjalan	461.994.822	573.685.398	*Additions during the year*
Arus kas	(585.313.070)	(185.720.560)	*Cash flow*
Perubahan non-kas	73.571.484	41.588.310	*Non-cash change*
Terminasi kontrak	(54.416.741)	(7.017.081)	*Contract termination*
Saldo akhir	**806.096.025**	**910.259.530**	***Ending balance***

Berdasarkan penilaian manajemen Grup, tidak ada kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset hak-guna pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Based on the evaluation of the Group's management, there are no events or changes in circumstances which may indicate impairment in value of right-of-use assets as of December 31, 2025 and 2024.

19. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA / *19. OTHER NON-CURRENT ASSETS*

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
Piutang sewa pembiayaan (Catatan 49p)	459.456.715	488.197.547	*Finance lease receivables (Note 49p)*
Uang muka pembelian aset tetap	369.184.128	48.901.805	*Advances for purchase of fixed assets*
Piutang atas rental QSR (Catatan 49v)	290.578.552	152.197.957	*Receivables for rental of QSR (Note 49v)*
Piutang pemulihan investasi	181.476.422	387.316.662	*Receivables investment recovery*
Pajak final dibayar di muka	196.980.231	207.321.274	*Prepaid final tax*
Goodwill	31.407.483	31.407.483	*Goodwill*
Aset lain-lain	176.968.601	150.446.159	*Other assets*
Subtotal	**1.706.052.132**	**1.465.788.887**	***Subtotal***
Beban tangguhan	535.002.791	434.124.457	*Deferred expense*
Dikurangi:			*Less:*
Akumulasi amortisasi beban tangguhan	(317.319.341)	(240.893.477)	*Accumulated amortization of deferred expense*
Subtotal	**217.683.450**	**193.230.980**	***Subtotal***
Total	**1.923.735.582**	**1.659.019.867**	***Total***

Uang muka pembelian aset tetap terutama merupakan uang muka atas pembangunan proyek *New Priok Eastern Access* (NPEA) di Tanjung Priok dan pembangunan proyek *Bali Maritime Tourism Hub* (BMTH) di Benoa.

Advances for purchase of fixed assets mainly represent construction for New Priok Eastern Access (NPEA) in Tanjung Priok and construction for Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) in Benoa.

Piutang pemulihan investasi adalah piutang atas laba neto TPK Koja yang belum didistribusikan ke Perusahaan.

Investment recovery receivables represents receivables from net income of TPK Koja which has not been distributed to the Company.

Pajak final dibayar di muka merupakan pajak final atas yang uang muka sewa ("ASR") PTP1 atas perjanjian COA dengan BNCT (Catatan 49v) serta ASR yang diterima dari NPCT1 oleh SPSL (Catatan 49c).

Prepaid final tax represents the final tax on Advance Site Rent (ASR) of PTP1 under the COA Agreement with BNCT (Note 49v) and ASR received by SPSL from NPCT1 (Note 49c).

Goodwill terutama merupakan *goodwill* yang timbul dari transaksi akuisisi 45,00% kepemilikan saham di CTP pada tahun 2015 senilai Rp31.407.481. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai pada akhir tahun.

Goodwill mainly represents goodwill arising from acquisition of 45.00% shares ownership in CTP (in 2015 amounting to Rp31,407,481. Management believes there is no impairment was identified at the end of the year.

Beban tangguhan terdiri dari beban tangguhan atas sertifikasi, pendidikan, perpanjangan hak atas tanah, survey, docking, dan pemeliharaan alat berat/*overhaul*.

Deferred expenses consist of deferred costs related to certification, training, land-rights extension, surveys, docking, and heavy-equipment maintenance/overhaul.

20. UTANG USAHA / *20. TRADE PAYABLES*

a. Berdasarkan pemasok / *a. Based on suppliers*

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
Pihak ketiga			*Third parties*
Swasta	798.878.146	760.307.131	*Private*
Perorangan	5.078.456	5.740.551	*Individuals*
Sub-total - pihak ketiga	803.956.602	766.047.682	*Sub-total - third parties*
Pihak berelasi (Catatan 44g)	128.326.253	96.565.849	*Related parties (Note 44g)*
Total	**932.282.855**	**862.613.531**	***Total***

b. Berdasarkan mata uang / *b. By currency*

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
Rupiah	931.735.620	859.717.543	*Rupiah*
Dolar AS	172.806	2.521.559	*US Dollar*
Dolar AUD	374.429	374.429	*AUD Dollar*
Total	**932.282.855**	**862.613.531**	***Total***

Utang usaha Grup merupakan utang usaha kerja sama mitra usaha yang timbul dari transaksi terkait pelayanan jasa kapal, jasa petikemas dan jasa non-petikemas serta bahan habis pakai yang digunakan dalam operasional.

The Group's trade payables are mainly payable for partnership related to ship services, container services and non-container services and consumables for operational.

21. LIABILITAS KONTRAK JANGKA PENDEK / *21. SHORT-TERM CONTRACT LIABILITIES*

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
Sewa kuartalan (Catatan 49c dan 49d)	765.618.473	731.219.513	*Quarterly rent (Notes 49c and 49d)*
Uang muka pelanggan			*Advances from customers*
Pihak ketiga	287.142.379	334.791.545	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 44h)	52.835.677	72.362.148	*Related parties (Note 44h)*
Pelayanan jasa pengusahaan tanah, bangunan, air dan listrik	37.612.757	156.779.059	*Land, building, water and electricity services*
Liabilitas kontrak jangka pendek - lainnya	14.148.586	18.096.593	*Other short-term contract liabilities*
Sub-total	1.157.357.872	1.313.248.858	*Sub-total*
Bagian lancar liabilitas kontrak jangka panjang (Catatan 28)	528.166.386	346.049.722	*Current portion of long-term contract liabilities (Note 28)*
Total	**1.685.524.258**	**1.659.298.580**	***Total***

Uang muka pelanggan merupakan penerimaan uang di muka dari pelanggan yang akan memperoleh pelayanan jasa kapal, jasa barang, jasa petikemas, dan jasa logistik dari Grup.

Advances from customers represents advances received from customers who will receive ship services, goods services, container services and logistic services from the Group.

22. BEBAN AKRUAL / *22. ACCRUED EXPENSES*

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
Pegawai	2.777.007.446	1.779.465.617	*Employees*
Kontraktor	2.029.141.139	644.257.800	*Contractors*
Kerja sama mitra usaha	1.514.490.949	1.439.857.145	*Partnership*
Bahan	826.376.272	484.539.500	*Material*
Umum	796.139.531	756.502.810	*General*
Pemeliharaan	486.649.385	528.558.112	*Maintenance*
Bunga	130.354.682	212.707.529	*Interest*
Biaya konsesi	70.584.720	76.664.904	*Concession fee*
Asuransi	67.769.619	45.128.387	*Insurance*
Lain-lain	715.855.634	698.729.447	*Others*
Total	**9.414.369.377**	**6.666.411.251**	***Total***

Beban akrual - pegawai terutama merupakan beban akrual untuk biaya bonus pegawai dan tantiem Direksi.

Accrued expenses - employees mainly represents accrued expenses for employee's bonus and Directors' tantiem.

Beban akrual - kontraktor merupakan biaya atas jasa pekerjaan konstruksi dan perbaikan yang telah dilaksanakan tetapi belum dibayarkan oleh perusahaan, termasuk jasa konsultasi manajemen konstruksi.

Accrued expenses - contractors represent the costs for construction and repair services that have been performed but have not yet been paid by the company, including construction management consulting services.

Beban akrual - kerja sama mitra usaha (KSMU) terutama merupakan pembagian pendapatan *(revenue sharing)* yang timbul dari perjanjian kerja sama dengan mitra terseleksi atas kegiatan pelayanan jasa bongkar muat, pemindahan lapangan penumpukan dan *lift on* dan *lift off* di pelabuhan serta beban pegawai non-organik.

Accrued expenses - the partnership expenses mainly represents the revenue sharing costs arising from the cooperation agreements with selected partners for providing loading and unloading activities, cargodoring, and lift-on and lift-off facilities at the ports and outsourcing expenses.

Beban akrual - umum terutama merupakan beban akrual atas biaya pelatihan dan pendidikan, jasa konsultan, serta biaya transportasi dan akomodasi terkait perjalanan dinas.

Accrued expenses - general mainly represents accrued liabilities for training and education costs, consulting services, as well as transportation and accomodation expenses related to official business travel.

Beban akrual - biaya konsesi merupakan biaya konsesi yang harus dibayarkan kepada Otoritas Pelabuhan sesuai dengan Perjanjian Konsesi (Catatan 48a).

Accrued expenses - concession fee represents concession fee to be paid to Port Authority in accordance with Concession Agreement (Note 48a).

23. LIABILITAS JANGKA PENDEK LAINNYA / *23. OTHER CURRENT LIABILITIES*

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
Pihak ketiga	755.771.691	517.102.900	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 44i dan 44j)	385.664.948	879.167.406	*Related parties (Notes 44i and 44j)*
Total	**1.141.436.639**	**1.396.270.306**	***Total***

Rincian liabilitas jangka pendek lainnya pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Details of other current liabilities as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
Uang titipan			***Deposit***
Pihak ketiga	175.885.365	213.478.213	*Third parties*
Pegawai	1.158.339	16.889.647	*Employee*
Pihak berelasi (Catatan 44i)	114.815.747	108.901.301	*Related parties (Note 44i)*
Sub-total	291.859.451	339.269.161	*Sub-total*
Lain-lain			***Others***
Pihak ketiga	578.727.987	286.735.040	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 44j)	270.849.201	770.266.105	*Related parties (Note 44j)*
Sub-total	849.577.188	1.057.001.145	*Sub-total*
Total	**1.141.436.639**	**1.396.270.306**	***Total***

Uang titipan dari pihak ketiga terutama merupakan sisa uang pengguna jasa kapal, jasa petikemas, dan jasa logistik yang belum dibayarkan kembali kepada pelanggan atau akan diperhitungkan dengan pelayanan berikutnya.

Deposit from third parties mainly represents remaining deposits from customers for ship services, container services and logistic services which have not been settled with the customer or will be taken into account with subsequent services.

Liabilitas jangka pendek lainnya - lain - lain pihak ketiga terutama merupakan utang yang timbul dari penerimaan uang jaminan penyediaan listrik.

Other current liabilites others third party mainly represents payables from deposits received for electricity provision.

24. PERPAJAKAN / *24. TAXATION*

a. Pajak dibayar di muka / *a. Prepaid taxes*

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
Perusahaan			*The Company*
Pajak Pertambahan Nilai	6.581	49.820	*Value Added Tax*
Pajak Penghasilan	157.148.036	207.093.443	*Income Taxes*
Sub-total	157.154.617	207.143.263	*Sub-total*
Entitas anak			*Subsidiaries*
Pajak Pertambahan Nilai	559.028.883	482.587.068	*Value Added Tax*
Pajak Penghasilan	99.505.973	84.712.941	*Income Taxes*
Sub-total	658.534.856	567.300.009	*Sub-total*
Total	**815.689.473**	**774.443.272**	***Total***

24. PERPAJAKAN (lanjutan) / *24. TAXATION (continued)*

a. Pajak dibayar di muka (lanjutan) / *a. Prepaid taxes (continued)*

Taksiran tagihan restitusi pajak / *Estimated claims for tax refund*

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
Perusahaan			*The Company*
Pajak Pertambahan Nilai			*Value Added Tax*
2025	35.479.385	-	*2025*
2024	44.871.041	44.871.041	*2024*
2023	-	27.849.884	*2023*
Pajak Penghasilan			*Income Tax*
2025	136.463.813	-	*2025*
2024	193.070.471	193.070.471	*2024*
2023	-	459.140.053	*2023*
Sub-total	409.884.710	724.931.449	*Sub-total*
Entitas anak			*Subsidiaries*
Pajak Pertambahan Nilai			*Value Added Tax*
2025	51.111.415	-	*2025*
2024	46.568.882	14.628.636	*2024*
2023	506.448	72.362.679	*2023*
2022	-	9.684.857	*2022*
2020	229.541	1.422.540	*2020*
Pajak Penghasilan			*Income Tax*
2025	87.924.816	-	*2025*
2024	241.158.441	243.764.624	*2024*
2023	5.667.612	60.321.421	*2023*
2021	-	4.008.690	*2021*
2020	8.538.131	9.308.550	*2020*
2019	-	1.986.941	*2019*
Sub-total	441.705.286	417.488.938	*Sub-total*
Total	**851.589.996**	**1.142.420.387**	***Total***

b. Utang pajak / *b. Taxes payable*

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
Perusahaan			*The Company*
Pajak Pertambahan Nilai	153.209.299	83.662.953	*Value Added Tax*
Pajak Penghasilan			*Income Taxes*
Pasal 4(2)	7.065.821	23.051.393	*Article 4(2)*
Pasal 21	-	12.364.101	*Article 21*
Pasal 22	-	256.093	*Article 22*
Pasal 23/26	-	3.960.239	*Article 23/26*
Lainnya	-	1.170	*Others*
Sub-total	160.275.120	123.295.949	*Sub-total*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

24. PERPAJAKAN (lanjutan) / *24. TAXATION (continued)*

b. Utang pajak (lanjutan) / *b. Taxes payable (continued)*

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
Entitas anak			*Subsidiaries*
PPh badan (Pasal 29)			*Corporate Income Tax (Article 29)*
2025	238.519.616	-	*2025*
2024	-	158.982.075	*2024*
Pajak Pertambahan Nilai	84.907.724	145.099.568	*Value Added Tax*
Pajak Penghasilan			*Income Taxes*
Pasal 4(2)	20.887.781	15.115.043	*Article 4(2)*
Pasal 15	35.387	111.192	*Article 15*
Pasal 21	21.624.771	22.480.234	*Article 21*
Pasal 22	261.074	116.053	*Article 22*
Pasal 23/26	29.497.098	21.112.499	*Article 23/26*
Pasal 25	14.873.703	13.029.239	*Article 25*
Lainnya	9.293.479	1.148.241	*Others*
Sub-total	419.900.633	377.194.144	*Sub-total*
Total	**580.175.753**	**500.490.093**	***Total***

c. Pajak penghasilan badan / *c. Corporate income tax*

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan badan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan taksiran laba pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

The reconciliation between income before corporate income tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and estimated taxable income for the year ended December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Laba sebelum pajak penghasilan badan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	5.094.471.160	3.981.443.935	*Income before corporate income tax as shown in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income*
Dikurangi:			*Less:*
Laba entitas anak sebelum pajak penghasilan badan	4.355.189.815	4.173.655.135	*Income before corporate income tax of subsidiaries*
Pembalikan atas jurnal eliminasi antar perusahaan pada saat konsolidasian	(3.267.247.586)	(4.150.894.234)	*Reversal of intercompany elimination entries during consolidation*
Laba sebelum pajak penghasilan badan - Perusahaan	4.006.528.931	3.958.683.034	*Income before corporate income tax expenses - the Company*

24. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Pajak penghasilan badan (lanjutan)

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan badan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan taksiran laba pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

24. TAXATION (continued)

c. Corporate income tax (continued)

The reconciliation between income before corporate income tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and estimated taxable income for the year ended December 31, 2025 and 2024 are as follows: (continued)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Beda temporer:			*Temporary differences:*
Penyisihan imbalan kerja karyawan	(246.573.378)	(22.545.356)	*Provision for employee benefits*
Bonus dan tantiem	523.306.029	268.489.997	*Bonus and tantiem*
Penyisihan penurunan nilai	72.891.043	8.631.646	*Allowance for impairment*
Penyusutan dan amortisasi	306.707.363	(269.942.696)	*Depreciation and amortization*
Beda permanen:			*Permanent differences:*
Beban umum	659.139.939	618.873.408	*General expenses*
Pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final	(3.677.564.980)	(3.569.383.143)	*Income subject to final income tax*
Beban terkait pajak penghasilan final	575.051.242	1.210.465.875	*Expenses related to final income tax*
Bagian laba neto entitas asosiasi	(2.992.341.623)	(3.258.632.793)	*Equity in net income of associates*
Bagian laba neto kerja sama operasi	(305.603.999)	-	*Income from joint operation*
Beban-beban yang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan perpajakan	831.929.393	607.906.185	*Expenses that are not deductible for tax purposes*
Pendapatan yang bukan merupakan objek pajak	(126.163)	(944.622.938)	*Income that are not subject for tax purposes*
Pendapatan konstruksi	(810.024.220)	(1.926.813.587)	*Construction revenue*
Beban konstruksi	807.843.044	1.862.528.768	*Construction expense*
Sub-total	(4.255.366.310)	(5.415.044.634)	*Sub-total*
Taksiran rugi pajak	**(248.837.379)**	**(1.456.361.600)**	***Estimated taxable loss***

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

24. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Pajak penghasilan badan (lanjutan)

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan badan dengan jumlah teoritis beban pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan laba sebelum pajak penghasilan badan dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

24. TAXATION (continued)

c. Corporate income tax (continued)

Reconciliation between corporate income tax expenses and the theoretical tax amount on profit before corporate income tax using the applicable tax rate are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Laba sebelum pajak penghasilan badan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	5.094.471.160	3.981.443.935	*Income before corporate income tax as shown in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income*
Dikurangi:			*Less:*
Laba entitas anak sebelum pajak penghasilan badan	4.355.189.815	4.173.655.135	*Income before corporate income tax of subsidiaries*
Pembalikan atas jurnal eliminasi antar perusahaan pada saat konsolidasian	(3.267.247.586)	(4.150.894.234)	*Reversal of intercompany elimination entries during consolidation*
Laba sebelum pajak penghasilan badan - Perusahaan	4.006.528.931	3.958.683.034	*Income before corporate income tax expenses - the Company*
Pajak penghasilan dihitung dengan tarif yang berlaku	881.436.365	870.910.267	*Income tax calculated at applicable rate*
Dampak perbedaan permanen:			*Effect of permanent differences:*
Beban umum	145.010.787	136.152.150	*General expenses*
Pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final	(809.064.296)	(785.264.291)	*Income subject to final income tax*
Beban terkait pajak penghasilan final	126.511.273	266.302.493	*Expenses related to final income tax*
Bagian laba neto entitas asosiasi	(658.315.157)	(716.899.214)	*Equity in net income of associates*
Bagian laba neto kerja sama operasi	(67.232.880)	-	*Income from joint operation*
Beban-beban yang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan perpajakan	183.024.466	133.739.361	*Expenses that are not deductible for tax purposes*
Pendapatan yang bukan merupakan objek pajak	(27.756)	(207.817.046)	*Income that are not subject for tax purposes*
Pendapatan konstruksi	(178.205.328)	(423.898.989)	*Construction revenue*
Beban konstruksi	177.725.470	409.756.329	*Construction expense*
Penyesuaian pajak tahun sebelumnya	4.902.450	(117.452.550)	*Adjustment*
Penyesuaian	(18.198.394)	(42.208.278)	*Adjustment*
Beban (manfaat) pajak penghasilan badan			***Corporate income tax expense (benefit)***
- Perusahaan	**(212.433.000)**	**(476.679.768)**	***- The Company***
- Entitas anak	**943.598.387**	**654.986.358**	***- Subsidiaries***
Total	**731.165.387**	**178.306.590**	***Total***

Untuk tujuan pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan, Perusahaan melakukan perhitungan taksiran laba (rugi) pajak secara tahunan.

For the purpose of filling the annual corporate income tax return, the Company calculate the taxable income (loss) on annual basis.

Perhitungan taksiran penghasilan kena pajak pada tahun 2025 akan menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan tahun 2025.

The calculation of estimated taxable income for the year 2025 will be used as a basis in filling the Annual Corporate Income Tax Return for the year 2025.

24. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Rincian beban pajak penghasilan dan final adalah sebagai berikut:

24. TAXATION (continued)

d. The details of Income tax expenses and final tax expenses are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Beban pajak final			*Final tax expense*
Perusahaan	356.652.066	384.842.225	*The Company*
Entitas anak	373.974.858	295.221.044	*Subsidiaries*
Total	**730.626.924**	**680.063.269**	***Total***
Beban pajak penghasilan badan			*Corporate income tax expense*
Kini			*Current*
Perusahaan	-	-	*The Company*
Entitas anak	1.144.790.711	886.121.839	*Subsidiaries*
Sub-total	1.144.790.711	886.121.839	*Sub-total*
Tangguhan			*Deferred*
Perusahaan	(212.433.000)	(476.679.768)	*The Company*
Entitas anak	(201.192.324)	(231.135.481)	*Subsidiaries*
Sub-total	(413.625.324)	(707.815.249)	*Sub-total*
Total	**731.165.387**	**178.306.590**	***Total***

e. Perhitungan beban pajak penghasilan kini - tahun berjalan dan taksiran lebih bayar dan kurang bayar pajak penghasilan badan adalah sebagai berikut:

e. The calculation of current income tax expense - current year and estimated overpayment and underpayment of corporate income tax are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Taksiran laba kena pajak			*Estimated taxable income*
Perusahaan	-	-	*The Company*
Entitas anak	3.637.482.571	4.022.699.190	*Subsidiaries*
Jumlah taksiran penghasilan kena pajak	3.637.482.571	4.022.699.190	*Total estimated taxable income*
Beban pajak penghasilan badan tahun berjalan			*Corporate income tax expense - current*
Perusahaan	-	-	*The Company*
Entitas anak	1.144.790.711	886.764.688	*Subsidiaries*
Jumlah beban pajak penghasilan badan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	1.144.790.711	886.764.688	*Corporate income tax expense per consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

24. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Perhitungan beban pajak penghasilan kini - tahun berjalan dan taksiran lebih bayar dan kurang bayar pajak penghasilan badan adalah sebagai berikut: (lanjutan)

24. TAXATION (continued)

e. The calculation of current income tax expense - current year and estimated overpayment and underpayment of corporate income tax are as follows: (continued)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Dikurangi pajak penghasilan dibayar di muka			*Less prepaid income tax*
Perusahaan	136.463.813	193.070.471	*The Company*
Entitas anak	973.284.982	967.855.407	*Subsidiaries*
Jumlah pajak penghasilan dibayar di muka	1.109.748.795	1.160.925.878	*Total prepaid income tax*
Taksiran utang pajak penghasilan - Pasal 29			*Estimated income tax payable - Article 29*
Perusahaan	-	-	*The Company*
Entitas anak	238.519.616	158.982.075	*Subsidiaries*
Total	**238.519.616**	**158.982.075**	***Total***
Taksiran tagihan restitusi pajak penghasilan			*Estimated claims for tax refund*
Perusahaan	136.463.813	193.070.471	*The Company*
Entitas anak	87.924.816	240.072.794	*Subsidiaries*
Total	**224.388.629**	**433.143.265**	***Total***

Berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia, entitas-entitas di dalam Grup menghitung dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak.

Under the taxation laws of Indonesia, entities within the Group calculates and pays tax on the basis of self assessment. The Directorate General of Tax may assess or amend tax liabilities within 5 (five) years of the time the tax becomes due.

24. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Pajak tangguhan

Rincian aset (liabilitas) pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

24. TAXATION (continued)

f. Deferred taxes

The details of deferred tax assets (liabilities) are as follows:

**Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025/
*Year Ended December 31, 2025***

	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Dibebankan pada/*Charged to* Laporan Laba (rugi)/ *Profit (loss)*	Dibebankan pada/*Charged to* Laporan penghasilan komprehensif lain/*OCI*	Penyesuaian/ *Adjustment*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Aset (liabilitas) pajak tangguhan						***Deferred tax assets (liabilities)***
Perusahaan						*The Company*
Liabilitas imbalan kerja	1.155.722.157	(54.246.143)	471.350.000	98.515.190	1.671.341.204	*Employess benefit liabilites*
Akrual biaya bonus pegawai	148.766.836	115.127.326	-	(26.026.524)	237.867.638	*Accrued expense for employee's bonus*
Penyisihan penurunan nilai piutang	210.735.687	16.036.029	-	71.700	226.843.416	*Provision for impairment of receivables*
Penyusutan dan amortisasi	(1.507.004.069)	67.475.620	-	(54.361.972)	(1.493.890.421)	*Depreciation and amortization*
Rugi fiskal	482.374.261	49.841.774	-	-	532.216.035	*Fiscal loss*
Sub-total	490.594.872	194.234.606	471.350.000	18.198.394	1.174.377.872	*Sub-total*
Entitas anak	865.535.389	117.021.144	1.343.852	81.549.931	1.065.450.316	*Subsidiaries*
Aset pajak tangguhan, neto	**1.356.130.261**	**311.255.750**	**472.693.852**	**99.748.325**	**2.239.828.188**	***Deferred tax assets, net***
Liabilitas Pajak Tangguhan neto						***Deferred Tax Liabilities, net***
Entitas anak	(91.699.230)	9.283.260	87.888	(2.529.675)	(84.857.757)	*Subsidiaries*

**Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024/
*Year Ended December 31, 2024***

	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Dibebankan pada/*Charged to* Laporan Laba (rugi)/ *Profit (loss)*	Dibebankan pada/*Charged to* Laporan penghasilan komprehensif lain/*OCI*	Penyesuaian/ *Adjustment*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Aset (liabilitas) pajak tangguhan						***Deferred tax assets (liabilities)***
Perusahaan						*The Company*
Liabilitas imbalan kerja	1.261.275.090	(4.959.978)	(200.053.624)	99.460.669	1.155.722.157	*Employess benefit liabilites*
Akrual biaya bonus pegawai	101.708.121	59.067.799	-	(12.009.084)	148.766.836	*Accrued expense for employee's bonus*
Penyisihan penurunan nilai piutang	208.836.725	1.898.962	-	-	210.735.687	*Provision for impairment of receivables*
Penyusutan dan amortisasi	(1.402.373.369)	(59.387.393)		(45.243.307)	(1.507.004.069)	*Depreciation and amortization*
Rugi fiskal	44.522.162	437.852.099	-	-	482.374.261	*Fiscal loss*
Sub-total	213.968.729	434.471.489	(200.053.624)	42.208.278	490.594.872	*Sub-total*
Entitas anak	630.129.880	237.090.447	(116.992)	(1.567.946)	865.535.389	*Subsidiaries*
Aset pajak tangguhan, neto	**844.098.609**	**671.561.936**	**(200.170.616)**	**40.640.332**	**1.356.130.261**	***Deferred tax assets, net***
Liabilitas Pajak Tangguhan neto						***Deferred Tax Liabilities, net***
Entitas anak	(86.843.304)	(5.323.753)	27.827	440.000	(91.699.230)	*Subsidiaries*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

24. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Surat Ketetapan Pajak

Perusahaan

1. Surat ketetapan pajak untuk tahun pajak 2019

Regional II (ex. Pelindo II)

Pada tanggal 27 April 2020, Perusahaan melaporkan lebih bayar pajak penghasilan badan 2019 sebesar Rp152.258.584. Berdasarkan hasil pemeriksaan pajak tanggal 21 April 2021, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") atas pajak penghasilan badan tahun 2019 sebesar Rp126.924.148, beserta keputusan lebih bayar pajak penghasilan badan yang disetujui oleh kantor pajak sebesar Rp149.312.463. Pada tanggal 19 Mei 2021, Perusahaan telah melakukan pembayaran atas pokok dan sanksi bunga serta mencatat aset tidak lancar lainnya sebesar Rp126.924.148.

Pada tanggal 15 Juli 2021, Perusahaan mengajukan keberatan atas SKPKB PPh badan 2019. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Pajak No. KEP-00706/KEB/PJ/WPJ.19/2022 tanggal 7 Juli 2022, memutuskan menolak keberatan Perusahaan.

Pada tanggal 16 September 2022, Perusahaan mengajukan banding ke pengadilan pajak.

Pada tanggal 31 Januari 2024, Perusahaan menerima Surat Keputusan Banding sebesar Rp274.852.187 atas lebih bayar pajak penghasilan badan 2019 dari yang diajukan sebesar Rp279.182.732. Atas selisih nilai yang diajukan dengan nilai yang disetujui oleh kantor pajak sebesar Rp4.330.545 telah dibebankan pada laba rugi pada tahun 2024.

24. TAXATION (continued)

g. Tax Assessment Letter

The Company

1. Tax assessment for fiscal year 2019

Regional II (ex. Pelindo II)

On April 27, 2020, the Company submitted overpayment of corporate income tax for fiscal year 2019 amounting to Rp152,258,584. Based on the result of tax audit dated on April 21, 2021, the Company received Tax Underpayment Assessment Letter ("SKPKB") for the 2019 corporate income tax amounting to Rp126,924,148, along with the decision of Company's overpayment applications were approved by the tax office amounting to Rp149,312,463. On May 19, 2021, the Company has paid the principal and interest penalties and recorded the underpayment in other non-current assets amounting to Rp126,924,148.

On July 15, 2021, the Company filed an objection to the 2019 corporate income tax SKPKB. Based on the Decree of the Director General of Taxes No. KEP-00706/KEB/PJ/WPJ.19/2022 dated July 7, 2022, decided to reject the Company's objection.

On September 16, 2022, the Company filed an appeal to the tax court.

On January 31, 2024, the Company received Appeal Decision Letter amounting to Rp274,852,187 for overpayment of corporate income tax fiscal year 2019 from the amount submitted of Rp279,182,732. The difference between the amount submitted and the amount approved by the tax office amounting to Rp4,330,545 has been charged to profit or loss in 2024.

24. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Surat Ketetapan Pajak (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

2. Surat ketetapan pajak untuk tahun pajak 2022

Pada tanggal 28 Mei 2024, Perusahaan menerima SKPLB sebesar Rp364.901.124 atas lebih bayar pajak penghasilan badan tahun pajak 2022 dari yang diajukan sebesar Rp391.085.385. Setelah dikompensasikan dengan kurang bayar pajak untuk masa pajak yang sama, jumlah yang diterima sebesar Rp345.936.131. Selisih antara jumlah yang diajukan dengan jumlah yang disetujui senilai Rp26.184.261 telah dibebankan pada laba rugi pada tahun 2024.

3. Surat ketetapan pajak untuk tahun pajak 2023

Pada tanggal 5 Juni 2025, Perusahaan menerima SKPLB Rp458.990.904 atas lebih bayar pajak penghasilan badan tahun pajak 2023 dari yang diajukan sebesar Rp459.140.053 Selisih antara jumlah yang diajukan dengan jumlah yang disetujui senilai Rp149.149 telah dibebankan pada laba rugi tahun berjalan. Setelah dikompensasikan dengan kurang bayar pajak untuk masa pajak yang sama seperti PPh Pasal 15, 21, 22, 23, final dan PPN, jumlah yang diterima oleh Perusahaan pada tanggal 22 Juli 2025 sebesar Rp438.630.005.

Pada tanggal 5 Juni 2025, Perusahaan menerima SKPLB sebesar Rp35.437.167 atas lebih bayar PPN masa Desember tahun 2023 dari yang diajukan sebesar Rp27.849.884. Selisih antara jumlah yang diajukan dengan jumlah yang disetujui sebesar Rp7.587.283 dibukukan sebagai pengurang PPN Masukan. Atas lebih bayar yang telah disetujui tersebut dibayarkan seluruhnya kepada Perusahaan pada tanggal 22 Juli 2025 sebesar Rp27.849.884.

24. TAXATION (continued)

g. Tax Assessment Letter (continued)

The Company (continued)

2. Tax assessment for fiscal year 2022

On May 28, 2024, the Company received SKPLB amounting to Rp364,901,124 for overpayment of corporate income tax fiscal year 2022 from the amount submitted of Rp391,085,385. After being compensated with underpayment for the same tax periods, the net refund received amounted to Rp345,936,131. The difference between the proposed amount and agreed amount with nominal Rp26,184,261 has been charged to profit or loss in 2024.

3. Tax assessment for fiscal year 2023

On June 5, 2025, the Company received SKPLB amounting to Rp458,990,904 for overpayment of corporate income tax fiscal year 2023 from the amount submitted of Rp459,140,053. The difference between the proposed amount and agreed amount with nominal Rp149,149 has been charged to current year profit or loss. After being compensated with underpayment for the same tax periods such as income tax art 15, 21, 22, 23, final and VAT, the net refund received by the Company on July 22, 2025 amounting to Rp438,630,005.

On June 5, 2025, the Company received SKPLB amounting to Rp35,437,167 for overpayment of VAT period December fiscal year 2023 from the amount submitted of Rp27,849,884. The difference between the proposed amount and agreed amount of Rp7,587,283 has been recorded as deduction to VAT In. The approved overpayment was fully refunded to the Company on July 22, 2025 amounting to Rp27,849,884.

24. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Surat Ketetapan Pajak (lanjutan)

SPTP

1. Surat ketetapan pajak untuk tahun pajak 2023

   Pada tanggal 24 April 2025, SPTP menerima SKPLB sebesar Rp24.049.823 atas lebih bayar pajak penghasilan badan tahun pajak 2023 dari yang diajukan sebesar Rp24.529.040. Selisih antara jumlah yang diajukan dengan jumlah yang disetujui senilai Rp479.217 telah dibebankan pada laba rugi. Setelah dikompensasikan dengan kurang bayar pajak untuk masa pajak yang sama, jumlah yang diterima sebesar Rp18.936.759. Selisih antara jumlah yang diterima dengan jumlah yang disetujui senilai Rp5.113.064 telah dibebankan pada laba rugi tahun berjalan.

2. Surat ketetapan pajak untuk tahun pajak 2024

   Pada tanggal 24 Desember 2025, SPTP menerima SKPLB sebesar Rp105.433.262 atas lebih bayar pajak penghasilan badan tahun pajak 2024 dari yang diajukan sebesar Rp105.433.262. Atas lebih bayar yang telah disetujui tersebut telah dibayarkan seluruhnya kepada SPTP pada tanggal 20 Februari 2026.

PTP1

Surat ketetapan pajak untuk tahun pajak 2019 dan 2020

Pada tanggal 4 Februari 2022, PTP1 menerima SKPLB atas PPN untuk masa pajak Desember 2019 dan Desember 2020 masing-masing sebesar Rp111.137.216 dan Rp8.764.186. Pada tanggal yang sama, PTP1 juga menerima SKPKB atas PPN untuk berbagai masa pajak tahun 2019 dan 2020 dengan nilai pokok kurang bayar sebesar Rp119.901.402 dan denda sebesar Rp89.926.051.

24. TAXATION (continued)

g. Tax Assessment Letter (continued)

SPTP

1. Tax assessment for fiscal year 2023

On April 24, 2025, SPTP received SKPLB amounting to Rp24,049,823 for overpayment of corporate income tax fiscal year 2023 from the amount submitted of Rp24,529,040. The difference between the proposed amount and agreed amount with nominal Rp479,217 has been charged to profit or loss. After being compensated with underpayment for the same tax periods, the net refund received amounted to Rp18,936,759. The difference between the net refund received and agreed amount with nominal Rp5,113,064 has been charged to profit or loss in current year.

2. Tax assessment for fiscal year 2024

On December 24, 2025, SPTP received SKPLB amounting to Rp105,433,262 for overpayment of corporate income tax fiscal year 2024 from the amount submitted of Rp105,433,262. The approved overpayment was fully refunded to SPTP on February 20, 2026.

PTP1

Tax assessment for fiscal year 2019 and 2020

On February 4, 2022, PTP1 received SKPLB for VAT for the tax periods of December 2019 and December 2020, amounting to Rp111,137,216 and Rp8,764,186 respectively. On the same date, PTP1 also received SKPKB for VAT for various tax periods in 2019 and 2020, with principal underpayment amounting to Rp119,901,402 and penalty amounting to Rp89,926,051.

24. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Surat Ketetapan Pajak (lanjutan)

PTP1 (lanjutan)

Surat ketetapan pajak untuk tahun pajak 2019 dan 2020 (lanjutan)

Pada 28 April 2022 dan berbagai tanggal selama 2024, PTP1 telah melakukan pembayaran atas SKPKB PPN masing-masing sebesar Rp88.554.088 dan Rp60.636.682. Pembayaran SKPKB PPN tersebut diklasifikasikan sebagai pajak dibayar di muka.

Pada 5 Agustus 2024, PTP1 mengajukan permohonan Peninjauan Kembali ("PK") ke Mahkamah Agung dan pada tanggal 30 April 2025, PTP1 telah memperoleh sebagian hasil putusan permohonan Peninjauan Kembali ("PK") yang diajukan ke Mahkamah Agung atas putusan banding Pengadilan Pajak terkait restitusi PPN masukan. Berdasaran hasil putusan tersebut, Majelis Hakim Agung menetapkan menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Perusahaan dan memerintahkan PTP1 untuk membayar kekurangan pajak dari SKPLB beserta sanksi/denda yang berlaku yang mana telah dicadangkan pada tahun 2024.

SPJM

Surat ketetapan pajak untuk tahun pajak 2022

Pada tahun 2022, SPJM mencatat lebih bayar atas PPN masa September, Oktober, November dan Desember sebesar Rp78.417.276. Atas lebih bayar tersebut, Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa jumlah lebih bayar yang disetujui adalah sebesar Rp77.780.860, selisih hasil pemeriksaan pajak tersebut dengan catatan SPJM sebesar Rp636.416 telah dibebankan pada laba rugi tahun 2024.

Pada bulan Agustus dan September 2024, SPJM menerima pengembalian sebesar Rp69.577.053 setelah dikurangi dengan beberapa Surat Tagihan Pajak ("STP") atas pajak penghasilan pasal 21 dan PPN sebesar Rp8.203.807 yang telah dibebankan pada laba rugi tahun 2024.

24. TAXATION (continued)

g. Tax Assessment Letter (continued)

PTP1 (lanjutan)

Tax assessment for fiscal year 2019 and 2020 (lanjutan)

On April 28, 2022, and various dates throughout 2024, PTP1 made payments for SKPKB VAT amounting to Rp88,554,088 and Rp60,636,682 respectively. These payments for SKPKB VAT were classified as prepaid tax.

On August 5, 2024, PTP1 filed an application for Judicial Review ("PK") to the Supreme Court and on April 30, 2025, PTP1 has obtained part of the decision for Judicial Review ("PK") from the Supreme Court on the Tax Court's appeal decision regarding restitution of VAT-in (Note 16e). Based on the decision, the Panel of Supreme Court Judges decided to reject the judicial review application submitted by the Company and ordered PTP1 to pay the amount of tax shortfall in accordance with the amount claimed by tax authorities including the fines/penalties which has been accrued in 2024.

SPJM

Tax assessment for fiscal year 2022

In 2022, SPJM recorded an overpayment of VAT for the September, October, November and December period amounted Rp78,417,276. For this overpayment, the Directorate General of Taxes stated that the approved overpayment amounted to Rp77,780,860, the difference in the results of the tax audit with SPJM's record amounted to Rp636,416 has been charged to profit or loss in 2024.

On August and September 2024, SPJM received restitution amounted to Rp69,577,053 net off with several Tax Collection Letter ("STP") of tax income article 21 and VAT amounted to Rp8,203,807 which has been charged to profit or loss in 2024.

24. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Surat Ketetapan Pajak (lanjutan)

SPJM (lanjutan)

Surat ketetapan pajak untuk tahun pajak 2022 (lanjutan)

Pada tahun 2022, SPJM mencatat lebih bayar atas PPh badan masa 2022 sebesar Rp28.515.386. Atas lebih bayar tersebut, Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa jumlah lebih bayar yang disetujui adalah sebesar Rp27.281.890, selisih hasil pemeriksaan pajak tersebut dengan catatan SPJM sebesar Rp1.233.495 telah dicatat sebagai bagian dari beban pajak kini. Pada bulan Juni 2024, SPJM menerima pengembalian sebesar Rp5.732.080 setelah dikurangi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") dan Surat Tagihan Pajak ("STP") atas pajak penghasilan pasal 21, 23 dan 4(2) sebesar Rp21.549.810 yang telah dibebankan pada laba rugi tahun 2024.

Surat ketetapan pajak untuk tahun pajak 2023

Pada tahun 2023, SPJM mencatat lebih bayar atas pajak penghasilan badan tahun fiskal 2023 sebesar Rp18.421.299 dan SPJM telah melaporkan pajak penghasilan badan tersebut pada April 2024. Pada bulan Juni 2024, Perusahaan menyampaikan pembetulan atas SPT PPh badan tersebut atas hasil audit pajak tahun fiskal 2022 yang berpengaruh pada koreksi fiskal positif dan negatif dan menyebabkan restitusi yang diajukan menjadi Rp21.673.125.

Atas lebih bayar tersebut, Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa jumlah lebih bayar yang disetujui adalah sebesar Rp21.043.049, selisih hasil pemeriksaan pajak tersebut dengan catatan SPJM sebesar Rp630.076 telah dicatat sebagai bagian dari beban pajak kini pada tahun berjalan.

24. TAXATION (continued)

g. Tax Assessment Letter (continued)

SPJM (continued)

Tax assessment for fiscal year 2022 (continued)

In 2022, SPJM recorded an overpayment of CIT for fiscal year 2022 amounted Rp28,515,386. For this overpayment, the Directorate General of Taxes stated that the approved overpayment amounted to Rp27,281,890, the difference in the results of the tax audit with SPJM's record amounted to Rp1,233,495 has been recorded as part of current income tax expenses. On June 2024, SPJM received restitution amounted to Rp5,732,080 net off with several Underpayment Tax Letter ("SKPKB") and Tax Collection Letter ("STP") of tax income article 21, 23 and 4(2) amounted to Rp21,549,810 which has been charged to profit or loss in 2024.

Tax assessment for fiscal year 2023

In 2023, the SPJM recorded overpayment of corporate income tax for fiscal year 2023 amounted to Rp18,421,299 and SPJM has reported the corporate income tax in April 2024. In June 2024, the Company reported correction in the corporate income tax based on tax audit result for fiscal year 2022 which affected positive and negative fiscal correction which the restitution is amounted to Rp21,673,125.

For this overpayment, the Directorate General of Taxes stated that the approved overpayment amounted to Rp21,043,049, the difference in the results of the tax audit with the SPJM record amounted to Rp630,076 has been recorded as part of current income tax expenses in current year.

24. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Surat Ketetapan Pajak (lanjutan)

SPJM (lanjutan)

Surat ketetapan pajak untuk tahun pajak 2023 (lanjutan)

Pada bulan Juli 2025, SPJM menerima pengembalian sebesar Rp705.810 setelah dikurangi dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") dan Surat Tagihan Pajak ("STP") atas pajak penghasilan 21, 23, 4(2) dan PPN sebesar Rp20.337.238 yang telah dicatat sebagai bagian dari beban operasi lainnya pada tahun berjalan.

Pada tahun 2023, SPJM mencatat lebih bayar atas PPN masa Januari sampai dengan Desember sebesar Rp16.620.072. Pada tanggal 4 Juli 2025 SPJM menerima SKPLB yang menyatakan bahwa jumlah lebih bayar yang disetujui adalah sebesar Rp14.621.511. Selisih hasil pemeriksaan pajak tersebut dengan catatan SPJM sebesar Rp1.998.561 telah dicatat sebagai bagian dari beban operasi lainnya pada tahun berjalan.

Pada bulan Juli dan Oktober 2025, SPJM menerima pengembalian sebesar Rp11.823.051 setelah dikurangi dengan beberapa Surat Tagihan Pajak ("STP") dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") atas pajak penghasilan 21 dan pajak pertambahan nilai sebesar Rp1.793.235 yang telah dicatat sebagai bagian dari beban operasi lainnya pada tahun berjalan.

24. TAXATION (continued)

g. Tax Assessment Letter (continued)

SPJM (continued)

Tax assessment for fiscal year 2023 (continued)

On July 2025, SPJM received restitution amounted to Rp705,810 net off with several Underpayment Tax Letter ("SKPKB") and Tax Collection Letter ("STP") of tax income article 21, 23, 4(2) and VAT amounted to Rp20,337,238 which has been recorded as part of other operating expenses in current year.

in 2023, SPJM recorded an overpayment of VAT for the January to December period amounted to Rp16,620,072. On July 4, 2025, SPJM received the Tax Overpayment Assessment Letter (SKPLB), which stated that the approved overpayment amount was Rp14,621,511. The difference in the results of the tax audit with SPJM record amounted to Rp1,998,561 has been recorded as part of other operating expenses in current year.

On July and October 2025, SPJM received restitution amounted to Rp11,823,051 net off with several Tax Collection Letter ("STP") and Underpayment Tax Assessment Letter ("SKPKB") of tax income article 21 and value added tax amounted to Rp1,793,235 which has been recorded as part of other operating expenses in current year.

24. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Surat Ketetapan Pajak (lanjutan)

JAI

Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Masa 2022 dan 2023

Pada tanggal 24 Oktober 2025 JAI menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ("SKPLB") sebesar Rp48.011.226 dari pengajuan restitusi PPN masa 2022 dan 2023 yang diajukan pada tanggal 18 Oktober 2024 sebesar Rp49.658.080.

Pada tanggal 13 November 2025, JAI menerima pembayaran atas SKPLB tersebut sebesar Rp47.643.169 setelah dikompensasi dengan Surat Tagihan Pajak ("STP") dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") sebesar Rp368.057.

Selisih antara pengajuan restitusi awal dengan SKPLB serta kompensasi atas STP dan SKPKB sehubungan dengan proses restitusi PPN ini telah diprovisikan pada tahun 2024.

PMS

Surat ketetapan pajak untuk tahun pajak 2020

Pada tanggal 16 Mei 2024, PMS menerima SKPKB pajak penghasilan tahun pajak 2020 sebesar Rp32.239.905 yang terdiri dari pokok kurang bayar dan sanksi administrasi masing-masing sebesar Rp16.119.952. PMS mengajukan permohonan pengurangan sanksi pada tanggal 24 Desember 2024 dan disetujui atas pengurangannya sebesar Rp12.089.964 melalui Surat Keputusan Pengurangan Sanksi atas SKPKB yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada tanggal 27 Februari 2025.

Atas pokok kurang bayar sebesar Rp16.119.952 dan sanksi administrasi sebesar Rp12.089.964 telah dibebankan pada laba rugi tahun berjalan.

24. TAXATION (continued)

g. Tax Assessment Letter (continued)

JAI

Value Added Tax Refunds Period 2022 and 2023

On October 24, 2025, JAI received a Tax Overpayment Assessment Letter ("SKPLB") amounting to Rp48,011,226 related to the VAT refund request for the 2022 and 2023 tax period submitted on October 18, 2024 amounted to Rp49,658,080.

On November 13, 2025, JAI received the payment of the SKPLB amounted Rp47,643,169 after being offset against a Tax Collection Letter ("STP") and a Tax Underpayment Assessment Letter ("SKPKB") amounted to Rp368,057.

The difference between the initial refund request and the SKPLB amount, including the compensation for STP and SKPKB related to this VAT refund process has been provisioned in 2024.

PMS

Tax assessment for fiscal year 2020

On May 16, 2024, PMS received a tax underpayment tax letter of CIT for fiscal year 2020 totaling Rp32,239,905 which comprised of underpayment and administration sanctions amounted to Rp16,119,952, respectively. Subsequently on December 24, 2024, PMS submitted a request for a reduction sanction and was approved with amount of reduction Rp12,089,964 through the Decision Letter on Reduction of Sanctions on SKPKB issued by the Directorate General of Taxes (DGT) on February 27, 2025.

The underpayment amounting to Rp16,119,952 and administrative sanctions amounting to Rp12,089,964 has been charged to profit or loss in current year.

24. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Surat Ketetapan Pajak (lanjutan)

PMS (lanjutan)

Surat ketetapan pajak untuk tahun pajak 2020 (lanjutan)

Pada tanggal 1 Desember 2023, PMS menerima SKPKB pajak penghasilan tahun pajak 2019 sebesar Rp36.900.240 yang terdiri dari pokok kurang bayar dan sanksi administrasi masing-masing sebesar Rp18.450.120. PMS mengajukan permohonan pengurangan sanksi pada tanggal 12 November 2024 dan disetujui atas pengurangannya sebesar Rp13.837.590 melalui Surat Keputusan Pengurangan Sanksi atas SKPKB yang dikeluarkan oleh DJP pada tanggal 20 Desember 2024. Atas pokok kurang bayar sebesar Rp18.450.120 dan sanksi administrasi sebesar Rp13.837.590 telah dibebankan pada laba rugi tahun berjalan.

ILCS

Pajak Pertambahan Nilai Tahun Fiskal 2023

Pada tanggal 10 Juli 2025, ILCS menerima SKPLB atas PPN bulan Januari-Desember 2023 sebesar Rp22.676.960 dari yang sebelumnya diajukan lebih bayar sebesar Rp22.704.598. ILCS telah mencatat selisih tersebut pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan. Pada berbagai tanggal di Agustus 2025, ILCS menerima restitusi atas SKPLB tersebut sebesar Rp22.676.960.

h. Kontribusi Pendapatan Pajak dan PNBP

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, kontribusi Grup terhadap pendapatan negara dari pembayaran pajak, pemungutan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) (basis kas) adalah sebagai berikut:

24. TAXATION (continued)

g. Tax Assessment Letter (continued)

PMS (continued)

Tax assessment for fiscal year 2020 (continued)

On December 1, 2023, PMS received a tax underpayment tax letter of CIT for fiscal year 2019 totaling Rp36,900,240 which comprised of underpayment and administration sanctions amounted to Rp18,450,120, respectively. Subsequently on November 12, 2024, PMS submitted a request for a reduction sanction and was approved with amount of reduction Rp13,837,590 through the Decision Letter on Reduction of Sanctions on SKPKB issued by DGT on December 20, 2024. The underpayment amounting to Rp18,450,120 and administrative sanctions amounting to Rp13,837,590 has been charged to profit or loss in current year.

ILCS

Value Added Tax Fiscal Year 2023

On July 10, 2025, ILCS received a "SKPLB" of Value Added Tax for January-December 2023 amounting to Rp22,676,960 from the previously proposed overpayment of Rp22,704,598. The Company has recorded the difference in the current year statement of profit or loss and other comprehensive income. On various date on August 2025, the Company received a restitution from "SKPLB" amounting to Rp22,676,960.

h. Contribution of Tax and Non Tax Revenue

As of December 31, 2025 and 2024, the Group's contribution to State income from tax payment, witholding tax and non-tax State revenue (PNBP) (cash basis) are as follows:

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
PPh	2.296.339.316	2.933.238.340	*Income tax*
PPN & PPNBM	2.456.253.454	2.327.240.431	*Value added tax & sales tax on luxury goods*
Bea masuk/keluar, bea & cukai dan bea Materai	4.505.370	4.921.510	*Import/exit duty, customs & exercise and stamp duty*
Pajak pemerintah pusat lainnya dan pajak daerah	306.875.561	254.160.848	*Other central government taxes and regional taxes*
PNBP			*PNBP*
Dividen	1.700.765.839	1.038.470.000	*Dividend*
PNBP lainnya	1.042.966.552	910.182.076	*Other PNBP*
Total kontribusi pembayaran pajak, pemungutan pajak dan PNBP	**7.807.706.092**	**7.468.213.205**	***Total contribution of tax payment, withholding tax and non-tax State revenue***

25. UTANG OBLIGASI

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, rincian dari utang obligasi adalah sebagai berikut:

25. BONDS PAYABLE

As of December 31, 2025 and 2024, the details of bonds payable are as follows:

Obligasi/ *Bonds*	Pokok Utang/ *Debt Principal*	Penerbit/ *Issuer*	31 Desember/*December 31*, 2025				
			Total/ *Total*	Diskonto dan Biaya Transaksi yang Belum Diamortisasi/ *Unamortized Discount and Transaction Cost*	Neto/ *Net*	Jangka Pendek/ *Current*	Jangka Panjang/ *Non-current*
Senior Notes Penerbitan Tahun 2015/ *Issued in 2015*	USD465.000.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo II)/ *the Company (formerly through Pelindo II)*	7.803.630.000	(115.447.566)	7.688.182.434	-	7.688.182.434
Obligasi I Pelindo I Gerbang Nusantara Tahun 2016 Seri D/ *Year 2016 Tranche D*	Rp50.000.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo I)/ *the Company (formerly through Pelindo I)*	50.000.000	(11.611)	49.988.389	49.988.389	-
Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 Seri C/Year 2018 Tranche C	Rp800.000.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo IV)/ *the Company (formerly through Pelindo IV)*	800.000.000	(225.243)	799.774.757	-	799.774.757
Total/*Total*			**8.653.630.000**	**(115.684.420)**	**8.537.945.580**	**49.988.389**	**8.487.957.191**

Obligasi/ *Bonds*	Pokok Utang/ *Debt Principal*	Penerbit/ *Issuer*	31 Desember/*December 31*, 2024				
			Total/ *Total*	Diskonto dan Biaya Transaksi yang Belum Diamortisasi/ *Unamortized Discount and Transaction Cost*	Neto/ *Net*	Jangka Pendek/ *Current*	Jangka Panjang/ *Non-current*
Senior Notes, Penerbitan Tahun 2015/ *Issued in 2015*	USD1.036.157.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo II)/ *the Company (formerly through Pelindo II)*	16.730.207.434	(8.344.936)	16.721.862.498	16.721.862.498	-
Senior Notes Penerbitan Tahun 2015/ *Issued in 2015*	USD465.200.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo II)/ *the Company (formerly through Pelindo II)*	7.518.562.400	(118.707.360)	7.399.855.040	-	7.399.855.040
Obligasi I Pelindo I Gerbang Nusantara Tahun 2016 Seri D/ *Year 2016 Tranche D*	Rp50.000.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo I)/ *the Company (formerly through Pelindo I)*	50.000.000	(34.834)	49.965.166	-	49.965.166
Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 Seri B/*Year 2018 Tranche B*	Rp1.820.000.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo IV)/ *the Company (formerly through Pelindo IV)*	1.725.000.000	(294.147)	1.724.705.853	1.724.705.853	-
Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 Seri C/Year 2018 Tranche C	Rp800.000.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo IV)/ *the Company (formerly through Pelindo IV)*	800.000.000	(555.969)	799.444.031	-	799.444.031
Total/*Total*			**26.823.769.834**	**(127.937.246)**	**26.695.832.588**	**18.446.568.351**	**8.249.264.237**

25. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Informasi lain mengenai utang obligasi pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

25. BONDS PAYABLE (continued)

Other information in relation to bonds payables as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

Obligasi/ *Bonds*	Peringkat/ *Rating*	Wali Amanat/ *Trustee*	Tempat Pencatatan/*Listed*	Tanggal Terbit/*Issue Date*	Jatuh Tempo/ *Due Date*	Periode Pembayaran Bunga/ *Interest Payment Period*	Tingkat Bunga per Tahun/ *Interest Rate per Annum*
Senior Notes, USD1.100.000.000, Pelindo II, Penerbitan Tahun 2015/ *Issued in 2015 i)*	Baa2, BBB (Moody's Investors Service, Inc. dan/*and* (Fitch Ratings Inc.)	The Bank of New York Mellon Corporation	Singapore Exchange Securities Trading Limited	5 Mei 2015/ *May 5, 2015*	5 Mei 2025/ May 5, 2025	Setengah tahunan/ *Semi-Annually*	4,250%
Senior Notes, USD500.000.000, Pelindo II, Penerbitan Tahun 2015/ *Issued in 2015 i)*	Baa2, BBB (Moody's Investors Service, Inc. dan/*and* (Fitch Ratings Inc.)	The Bank of New York Mellon Corporation	Singapore Exchange Securities Trading Limited	5 Mei 2015/ *May 5, 2015*	5 Mei 2045/ *May 5, 2045*	Setengah tahunan/ *Semi-Annually*	5,375%
Senior Notes USD500.000.000, Penerbitan Tahun 2014/ *Issued in 2014 i)*	Baa2, BBB (Moody's Investors Service, Inc. dan/*and* (Fitch Ratings Inc.)	The Bank of New York Mellon Corporation	Singapore Exchange Securities Trading Limited	1 Oktober 2014/ *October 1, 2014*	1 Oktober 2024/ *October 1, 2024*	Setengah tahunan/*Semi -Annually*	4,875%
Obligasi I Pelindo I Gerbang Nusantara Tahun 2016 Seri C/ *Year 2016 Tranche C* ii)	idAAA/*Stable* (PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo"))	PT Bank Tabungan Negara Tbk	Bursa Efek Indonesia	21 Juni 2016/ *June 21, 2016*	21 Juni 2023/ *June 21, 2023*	3 (tiga) bulanan/ *Quarterly*	9,250%
Obligasi I Pelindo I Gerbang Nusantara Tahun 2016 Seri D/ *Year 2016 Tranche D* ii)	idAAA/*Stable* (PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo"))	PT Bank Tabungan Negara Tbk	Bursa Efek Indonesia	21 Juni 2016/ *June 21, 2016*	21 Juni 2026/ *June 21, 2026*	3 (tiga) bulanan/ *Quarterly*	9,500%
Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 Seri A/ *Year 2018 Tranche A* i)	idAAA/*Stable* (PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo"))	PT Bank Tabungan Negara Tbk	Bursa Efek Indonesia	4 Juli 2018/ *July 4, 2018*	4 Juli 2023/ *July 4, 2023*	3 (tiga) bulanan/ *Quarterly*	8,000%
Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 Seri B/ *Year 2018 Tranche B* i)	idAAA/*Stable* (PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo"))	PT Bank Tabungan Negara Tbk	Bursa Efek Indonesia	4 Juli 2018/ *July 4, 2018*	4 Juli 2025/ *July 4, 2025*	3 (tiga) bulanan/ *Quarterly*	9,150%
Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 Seri C/ *Year 2018 Tranche C* i)	idAAA/*Stable* (PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo"))	PT Bank Tabungan Negara Tbk	Bursa Efek Indonesia	4 Juli 2018/ *July 4, 2018*	4 Juli 2028/ *July 4, 2028*	3 (tiga) bulanan/ *Quarterly*	9,350%

Jaminan

i) Tidak dijamin

ii) Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan (dahulu Pelindo I) baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang obligasi sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 KUHP.

Collateral

i) Unsecured

ii) These bonds are not guaranteed by special collaterals, but are guaranteed by all the Company's (formerly Pelindo I) assets, both moving and immovable goods, both existing and existing in the future to become collateral for bondholders in accordance with the provisions in articles 1131 and 1132 of the KUHP.

25. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi digunakan untuk melunasi pinjaman dan rencana ekspansi Perusahaan serta tujuan umum Perusahaan. Perusahaan juga diharuskan untuk mempertahankan rasio keuangan tertentu.

Pelunasan utang obligasi

Pada tahun 2025 dan 2024, Perusahaan telah melakukan pelunasan atas utang obligasi dengan rincian sebagai berikut:

25. BONDS PAYABLE (continued)

Proceeds from the bond offering were used to refinance loan and will be used for the Company's expansion plan and the Company's general purposes. The Company must also maintain certain financial ratios.

Redemptions of bonds payable

On 2025 and 2024, the Company have made redemptions of bonds payable with the following details:

Obligasi/ *Bonds*	Tanggal pelunasan/ *Redemption date*	Keterangan/ *Description*	Nilai nominal/ *Face value*
Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 Seri A/*Year 2018 Tranche A*	24 Juni/*June* 2025	Pelunasan/ *Redemption*	Rp1.820.000.000
Senior Notes USD1.100.000.000, Penerbitan Tahun 2014/ *Issued in 2014*	28 April/*April* 2025	Pelunasan/ *Redemption*	USD1.100.000.000
Senior Notes USD500.000.000, Penerbitan Tahun 2014/ *Issued in 2014*	27 September/ *September* 2024	Pelunasan/ *Redemption*	USD500.000.000

Lindung nilai arus kas

Proporsi dari Senior Notes USD1.100.000.000 Penerbitan Tahun 2015, Senior Notes USD500.000.000 Penerbitan Tahun 2015 dan Senior Notes USD500.000.000 Penerbitan Tahun 2014 telah memenuhi kriteria dan berlaku efektif sebagai lindung nilai arus kas mulai 1 Januari 2022. Oleh karenanya, laba/rugi selisih kurs dari proporsi Senior Notes tersebut dalam mata uang asing, masing-masing sebesar Rp877.223.295 dan Rp802.415.480 pada tahun 2025 dan 2024, dicatat sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lain. Penghasilan komprehensif lain tersebut akan terealisasi ke laba rugi hingga tahun 2025 dan 2045 sesuai dengan jatuh tempo dari masing-masing Senior Notes tersebut. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, penghasilan komprehensif lain tersebut telah terealisasi ke laba rugi masing-masing sebesar Rp1.022.478.261 dan Rp639.029.500.

Cash flow hedge

Proportions of Senior Notes USD1,100,000,000 Issued in 2015, Senior Notes USD500,000,000 Issued in 2015 and Senior Notes USD500,000,000 Issued in 2014 are designated as effective cash flow hedges starting January 1, 2022. Therefore, the gain/loss on foreign exchange of proportions of Senior Notes denominated in foreign currency, amounting to Rp877,223,295 and Rp802,415,480, respectively, were reported as part of other comprehensive income. Such other comprehensive income will be recycled to profit or loss until 2025 and 2045 in accordance with the maturity of each Senior Notes. For the year ended December 31, 2025 and 2024, such other comprehensive income has been recycled to profit or loss amounted to Rp1,022,478,261 and Rp639,029,500,respectively.

26. UTANG BANK JANGKA PANJANG

26. LONG-TERM BANK LOANS

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
Utang bank jangka panjang	38.389.779.489	24.515.744.350	*Long-term bank loans*
Bagian lancar	(4.294.440.048)	(1.068.675.471)	*Current portion*
Utang bank jangka panjang, setelah dikurangi bagian lancar	**34.095.339.441**	**23.447.068.879**	***Long-term bank loans, net of current portion***

26. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan) / *26. LONG-TERM BANK LOANS (continued)*

31 Desember 2025 / *December 31, 2025*	Bagian lancar/ *Current portion*	Bagian jangka panjang/*Long term portion*	Total	
Perusahaan / ***The Company***				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.990.265.948	17.569.735.842	19.560.001.790	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank SMBC Indonesia Tbk	1.104.863.948	2.741.020.842	3.845.884.790	*PT Bank SMBC Indonesia Tbk*
PT Bank Mega Tbk	161.107.200	3.188.580.000	3.349.687.200	*PT Bank Mega Tbk*
PT Bank OCBC NISP Tbk	587.311.263	436.258.159	1.023.569.422	*PT Bank OCBC NISP Tbk*
Bank of China (Hong Kong) Ltd Jakarta Branch	41.955.000	797.145.000	839.100.000	*Bank of China (Hong Kong) Ltd Jakarta Branch*
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	391.540.842	291.040.157	682.580.999	*PT Bank Muamalat Indonesia Tbk*
Sub-total	**4.277.044.201**	**25.023.780.000**	**29.300.824.201**	***Sub-total***
Entitas Anak / ***Subsidiaries***				
CTP / ***CTP***				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	8.602.692	8.622.186.505	8.630.789.197	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
BMS / ***BMS***				
PT Bank SMBC Indonesia Tbk	72.157.761	588.505.854	660.663.615	*PT Bank SMBC Indonesia Tbk*
Total pokok utang	**4.357.804.654**	**34.234.472.359**	**38.592.277.013**	***Total principal of loans***
Dikurangi: / *Less:*				
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi / *Unamortized costs of loans*	(63.364.606)	(139.132.918)	(202.497.524)	
Total	**4.294.440.048**	**34.095.339.441**	**38.389.779.489**	***Total***

31 Desember 2024 / *December 31, 2024*	Bagian lancar/ *Current portion*	Bagian jangka panjang/*Long term portion*	Total	
Perusahaan / ***The Company***				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	419.482.335	10.604.428.948	11.023.911.283	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank SMBC Indonesia Tbk	309.785.135	3.865.526.148	4.175.311.283	*PT Bank SMBC Indonesia Tbk*
PT Bank OCBC NISP Tbk	161.603.838	1.373.632.623	1.535.236.461	*PT Bank OCBC NISP Tbk*
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	107.735.892	915.755.082	1.023.490.974	*PT Bank Muamalat Indonesia Tbk*
Sub-total	**998.607.200**	**16.759.342.801**	**17.757.950.001**	***Sub-total***
Entitas Anak / ***Subsidiaries***				
CTP / ***CTP***				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	17.672.065	1.796.420.603	1.814.092.668	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	14.122.891	1.435.635.932	1.449.758.823	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT CIMB Niaga Tbk	9.234.455	957.417.878	966.652.333	*PT CIMB Niaga Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	8.475.911	861.602.782	870.078.693	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Pan Indonesia Tbk	4.621.351	479.136.411	483.757.762	*PT Bank Pan Indonesia Tbk*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	3.518.117	364.754.439	368.272.556	*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk*
PT Bank DKI	3.512.234	364.144.435	367.656.669	*PT Bank DKI*
BMS / ***BMS***				
PT Bank SMBC Indonesia Tbk	39.645.004	521.793.889	561.438.893	*PT Bank SMBC Indonesia Tbk*
Total pokok utang	**1.099.409.228**	**23.540.249.170**	**24.639.658.398**	***Total principal of loans***
Dikurangi: / *Less:*				
Biaya pinjaman yang belum diamortisasi / *Unamortized costs of loans*	30.733.757	93.180.291	123.914.048	
Total	**1.068.675.471**	**23.447.068.879**	**24.515.744.350**	***Total***

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

26. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

Perusahaan

Pinjaman Bank Sindikasi 23 Desember 2022

Berdasarkan Akta Perjanjian Ketentuan Umum Pembiayaan No. 19 tanggal 23 Desember 2022 dari Notaris Julius Purnawan, SH, MSi, notaris di Jakarta, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit sindikasi dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank SMBC Indonesia Tbk, PT Bank OCBC NISP Tbk dan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Agen Fasilitas Global.

Perusahaan memperoleh fasilitas Pinjaman Term Loan dan Term Financing Al Musyarakah sebesar maksimal USD750.000.000 dengan opsi akordion sebesar USD250.000.000, dengan rincian berikut:

26. LONG-TERM BANK LOANS (continued)

The Company

Syndicated Bank Loans December 23, 2022

Based on the Deed of Agreement on General Provisions for Financing No. 19 dated December 23, 2022 from Notary Julius Purnawan, SH, MSi, notary in Jakarta, the Company obtained syndicated credit facilities from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank SMBC Indonesia Tbk, PT Bank OCBC NISP Tbk and PT Bank Muamalat Indonesia Tbk with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as the Facility Global Agent.

The Company obtained Al Musyarakah Term Loan and Term Financing facilities maximum amounting USD750,000,000 with accordion option amounting USD250,000,000, with the following details:

Agen Pinjaman Sindikasi/ *Syndicated Loan Agent*	Fasilitas A/ *Facility A*	Fasilitas B/ *Facility B*
Fasilitas Konvensional/*Conventional Facilities*		
PT Bank SMBC Indonesia Tbk	USD166.675.000	USD83.325.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	USD166.675.000	USD83.325.000
PT Bank OCBC NISP Tbk	USD99.990.000	USD50.010.000
Fasilitas *Musyarakah/ Musyarakah Facility*		
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	USD66.660.000	USD33.340.000
Total	**USD 500.000.000**	**USD 250.000.000**

Pinjaman tersebut berjangka waktu 5 tahun digunakan untuk membiayai kegiatan usaha Perusahaan, termasuk pembiayaan kembali pinjaman yang telah ada. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga mengambang tahunan sebesar SOFR 3 bulan + margin 1%.

Fasilitas Konvensional yang diberikan oleh para kreditur awal terdiri dari:
- Fasilitas Konvensional A: fasilitas pinjaman berjangka dengan komitmen, dan
- Fasilitas Konvensional B: fasilitas pinjaman berjangka tanpa komitmen.

Fasilitas Musyarakah yang diberikan oleh peserta Musyarakah awal terdiri dari:
- Fasilitas Musyarakah A: fasilitas pembiayaan berjangka *al musyarakah* dengan komitmen,
- Fasilitas Musyarakah B: fasilitas pembiayaan berjangka *al musyarakah* tanpa komitmen.

Perusahaan akan menggunakan semua jumlah yang dipinjam olehnya berdasarkan Fasilitas untuk *general corporate purpose*, termasuk pembiayaan investasi maupun pembiayaan kembali pinjaman yang telah ada.

The loan will mature in 5 years period and was used to finance the Company operational activities, including the refinancing of its outstanding loan. The loan will bore interest at the annual floating rate of SOFR 3 Months + margin 1%.

Conventional facilities provided by the initial lenders consist of:
- *Conventional Facility A: committed term loan facility, and*
- *Conventional Facility B: uncommitted term loan facility.*

Musyarakah facilities provided by the initial Musyarakah participants consist of:
- *Musyarakah Facility A: comitted term financing al musyarakah, and*
- *Musyarakah Facility B: uncommitted term financing al musyarakah.*

Based The Company will use all the amount borrowed by it based on the facility for general corporate purpose, including investment financing and refinancing existing loans

26. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

Pinjaman Bank Sindikasi 23 Desember 2022 (lanjutan)

Pada tanggal 26 April 2023, Perusahaan memperoleh Distribusi Penarikan Fasilitas Konvensional dan Fasilitas Musyarakah A masing-masing senilai USD433.340.000 dan USD66.660.000.

Pembayaran angsuran pinjaman tersebut untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar USD170.000.000 dan USD25.000.000. Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, saldo pinjaman dari fasilitas ini masing-masing sebesar USD305.000.000 (setara dengan Rp5.118.510.000) dan USD475.000.000 (setara dengan Rp7.676.950.000).

Pinjaman Bank Sindikasi 21 Juni 2024

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 36 tanggal 21 Juni 2024 dari Notaris Fathiah Helmi, SH, notaris di Jakarta, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank SMBC Indonesia Tbk dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Agen Fasilitas.

Perusahaan memperoleh fasilitas Pinjaman *Term Loan* sebesar Rp4.000.000.000 dan USD200.000.000, dengan rincian sebagai berikut:

Agen Pinjaman Sindikasi/ *Syndicated Loan Agent*	Fasilitas A/ *Facility A*	Fasilitas B/ *Facility B*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Rp4.000.000.000	USD100.000.000
PT Bank SMBC Indonesia Tbk	-	USD100.000.000
Total	**Rp4.000.000.000**	**USD200.000.000**

Pinjaman tersebut berjangka waktu 5 tahun digunakan untuk membiayai kegiatan usaha Perusahaan, termasuk pembiayaan kembali pinjaman yang telah ada. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga mengambang tahunan sebesar JIBOR 3 bulan + margin 0,30% untuk Fasilitas A dan SOFR 3 bulan + margin 0,90% Fasilitas B.

Perusahaan akan menggunakan sebagian dari jumlah yang dipinjam berdasarkan fasilitas untuk *general corporate purpose*, termasuk pembiayaan investasi dan *refinancing* pinjaman yang telah ada.

26. LONG-TERM BANK LOANS (continued)

The Company (continued)

Syndicated Bank Loans December 23, 2022 (continued)

On April 26, 2023, the Company obtained a Series of Withdrawal Distribution of Conventional Facility and Musyarakah A amounted each to USD433,340,000 and USD66,660,000, respectively.

Total installments payment for the year ended December 31, 2025 and 2024 amounted to USD170.000.000 and USD25.000.000, respectively. As of December 31, 2025 and 2024, the outstanding loan from this facility amounted to USD305,000,000 (equivalent to Rp5,118,510,000) and USD475,000,000 (equivalent to Rp7,676,950,000), respectively.

Syndicated Bank Loans June 21, 2024

Based on the Credit Agreement Deed No. 36 dated June 21, 2024, from Notary Fathiah Helmi, SH, a notary in Jakarta, the Company obtained a credit facility from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk and PT Bank SMBC Indonesia Tbk with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as the Facility Agent.

The Company obtained a Term Loan facility amounting to Rp4,000,000,000 and USD200,000,000, with the following details:

The loan will mature in 5 years period and was used to finance the Company operational activities, including the refinancing of its outstanding loan. The loan will bore interest at the annual floating rate of JIBOR 3 months + margin 0.30% for Facility A and SOFR 3 months + margin 0.90% for Facility B.

The Company will use a portion of the amount borrowed under the facility for general corporate purposes, including financing investments and refinancing existing loans.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

26. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

Pinjaman Bank Sindikasi 21 Juni 2024 (lanjutan)

Pada tanggal 30 Agustus 2024, Perusahaan memperoleh Distribusi Penarikan Fasilitas A senilai Rp2.000.000.000.

Pada tanggal 29 September 2024, Perusahaan memperoleh Distribusi Penarikan Fasilitas B senilai USD200.000.000.

Pada tanggal 30 Juni 2025, Perusahaan memperoleh Distribusi Penarikan Fasilitas A senilai Rp1.750.000.000.

Pembayaran angsuran pinjaman tersebut untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 untuk Fasilitas A dan B sebesar Rp93.750.000 dan USD 5.000.000, sedangkan pembayaran angsuran pinjaman pada tahun yang berakhir 31 Desember 2024 untuk masing-masing fasilitas sebesar RpNil dan USDNil.

Pada tanggal 31 Desember 2025, saldo pinjaman dari fasilitas ini masing-masing sebesar Rp3.656.250.000 dan USD195.000.000 (setara dengan Rp3.272.490.000).

Pinjaman Kredit 5 Desember 2024

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 7 tanggal 5 Desember 2024 dari Notaris Fathiah Helmi, SH, notaris di Jakarta, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari Bank of China (Hong Kong) Limited sebesar USD50.000.000.

Pinjaman tersebut berjangka waktu 5 tahun akan digunakan untuk *general corporate purpose*. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga mengambang tahunan sebesar SOFR 3 bulan + margin 0,90%.

Pada tanggal 30 April 2025, Perusahaan memperoleh Distribusi Penarikan Fasilitas kredit senilai USD50.000.000.

Per tanggal 31 Desember 2025, Perusahaan belum memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran pinjaman.

Pada tanggal 31 Desember 2025, saldo pinjaman dari fasilitas ini sebesar USD50.000.000 (setara dengan Rp839.100.000).

26. LONG-TERM BANK LOANS (continued)

The Company (continued)

Syndicated Bank Loans June 21, 2024 (continued)

On August 30, 2024, the Company obtained a Series of Withdrawal Distribution of Facility A amounted to Rp2,000,000,000.

On September 29, 2024, the Company obtained a Series of Withdrawal Distribution of Facility B amounted to USD200,000,000.

On June 30, 2025, the Company obtained a Series of Withdrawal Distribution of Facility A amounted to Rp1,750,000,000.

Total installments payment for the year ended December 31, 2025 of Facility A and B amounted to Rp93,750,000 and USD5,000,000, meanwhile installments payment for the year ended December 31, 2024 of each facilities amounted to RpNil and USDNil.

As of December 31, 2025, the outstanding loan from this facility amounted to Rp3,656,250,000 and USD195,000,000 (equivalent to Rp3,272,490,000).

Credit Facility December 5, 2024

Based on the Credit Agreement Deed No. 7 dated December 5, 2024, from Notary Fathiah Helmi, SH, a notary in Jakarta, the Company obtained a credit facility from Bank of China (Hong Kong) Limited amounting to USD50,000,000.

The loan will mature in 5 years period will use the facility for general corporate purposes. The loan will bore interest at the annual floating rate of SOFR 3 months + margin 0.90%.

On April 30, 2025, the Company obtained a Series of Withdrawal Distribution of Credit Facility amounted to USD50,000,000.

As of December 31, 2025, the Company has not any obligations to make installment payments.

As of December 31, 2025, the outstanding loan from this facility amounted to USD50,000,000 (equivalent to Rp839,100,000).

26. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

Pinjaman Bank Sindikasi 9 Desember 2024

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 8 tanggal 9 Desember 2024 dari Notaris Fathiah Helmi, SH, notaris di Jakarta, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank SMBC Indonesia Tbk dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Agen Fasilitas.

Perusahaan memperoleh fasilitas Pinjaman *Term Loan* sebesar USD950.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

Agen Pinjaman Sindikasi/ *Syndicated Loan Agent*	Fasilitas/ *Facility*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	USD750.000.000
PT Bank SMBC Indonesia Tbk	USD200.000.000
Total	**USD950.000.000**

Pinjaman tersebut berjangka waktu 5 tahun digunakan untuk membiayai kegiatan usaha Perusahaan, termasuk pembiayaan kembali pinjaman yang telah ada. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga mengambang tahunan sebesar SOFR 3 bulan + margin 1,00%.

Perusahaan akan menggunakan sebagian dari jumlah yang dipinjam berdasarkan fasilitas untuk pembiayaan investasi dan *refinancing* pinjaman yang telah ada.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perusahaan memperoleh Distribusi Penarikan Fasilitas Kredit senilai USD300.000.000.

Berdasarkan Sertifikat transfer Perjanjian Kredit terkait Fasilitas Pinjaman Berjangka USD950.000.000 antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Agen Fasilitas dengan PT Bank SMBC Indonesia Tbk (”Kreditur Yang Ada’’) akan dilakukan pengalihan Komitmen Awal PT Bank SMBC Indonesia Tbk senilai USD200.000.000 ke PT Bank Mandiri (Persero) Tbk pada tanggal 27 Maret 2025.

26. LONG-TERM BANK LOANS (continued)

The Company (continued)

Syndicated Bank Loans December 9, 2024

Based on the Credit Agreement Deed No. 8 dated December 9, 2024, from Notary Fathiah Helmi, SH, a notary in Jakarta, the Company obtained a credit facility from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk and PT Bank SMBC Indonesia Tbk, with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as the Facility Agent.

The Company obtained a Term Loan facility amounting to USD950,000,000, with the following details:

The loan will mature in 5 years period and was used to finance the Company operational activities, including the refinancing of its outstanding loan. The loan will bore interest at the annual floating rate of SOFR 3 months + margin 1.00%.

The Company will use a portion of the amount borrowed under the facility financing investments and refinancing existing loans.

On December 31, 2024, the Company obtained a Series of Withdrawal Distribution of Credit Facility amounted to USD300,000,000.

Based on the Transfer Certificate of the Loan Agreement amounted to USD950,000,000 Term Loan Facility between PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as the Facility Agent and PT Bank SMBC Indonesia Tbk (the “Existing Lender”), the initial commitment of PT Bank SMBC Indonesia Tbk amounted to USD 200,000,000 shall be transferred to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk on March 27, 2025.

26. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

Pinjaman Bank Sindikasi 9 Desember 2024 (lanjutan)

Pembayaran angsuran pinjaman tersebut untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar USD 1.900.000 dan USDNil.

Pada tanggal 27 Mei 2025 telah dilakukan Pengalihan Perjanjian PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (''Kreditur Yang Ada'') kepada PT Bank Mega Tbk (''Kreditur Baru''). Nilai hak dan/atau kewajiban yang dialihkan ke PT Bank Mega Tbk sebesar USD200.000.000.

Pinjaman Kredit 10 Desember 2025

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 10 tanggal 10 Desember 2025 dari Notaris Nanda Fauz Iwan, SH, Notaris di Jakarta, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank SMBC Indonesia Tbk sebesar USD200.000.000.

Pinjaman tersebut berjangka waktu 5 tahun akan digunakan untuk *general corporate purpose*. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga mengambang tahunan sebesar SOFR 3 bulan + margin 1%.

Pada tanggal 30 Desember 2025, Perusahaan memperoleh Distribusi Penarikan Fasilitas Kredit senilai USD30.000.000.

Pada tanggal 31 Desember 2025, saldo pinjaman dari fasilitas ini sebesar USD30.000.000 (setara dengan Rp503.460.000).

Informasi lain mengenai utang bank jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

26. LONG-TERM BANK LOANS (continued)

The Company (continued)

Syndicated Bank Loans December 9, 2024 (continued)

Total installments payment for the year ended December 31, 2025 and 2024 of each loan amounted to USD1,900,000 and USDNil.

On May 27, 2025, an assignment of agreement from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (the "Existing Creditor") to PT Bank Mega Tbk (the "New Creditor") was duly effected. The aggregate value of the rights and/or obligations assigned to PT Bank Mega Tbk amounted to USD200,000,000.

Credit facility December 10, 2025

Based on the Credit Agreement Deed No. 10 dated December 10, 2025, from Notary Nanda Fauz Iwan, SH, a notary in Jakarta, the Company obtained a credit facility from PT Bank SMBC Indonesia Tbk amounted to USD200,000,000.

The loan will mature in 5 years period will use the facility for general corporate purposes. The loan will bore interest at the annual floating rate of SOFR 3 months + margin 1%.

On December 30, 2025, the Company obtained a Series of Withdrawal Distribution of Credit Facility Phase II amounted to USD30,000,000.

As of December 31, 2025, the outstanding loan from this facility amounted to USD30,000,000 (equivalent to Rp503,460,000).

Other information in relation to long-term bank loans as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

Fasilitas Pinjaman/ *Credit Facility*	Kreditur/ *Creditor*	Jadwal Pembayaran/ *Repayment Schedule*	Jangka Waktu (Tahun)/ *Period (Year)*	Tingkat Bunga/ *Interest Rates*	Jaminan/ *Collateral*
Perusahaan/*The Company*					
Pinjaman Bank Sindikasi/ *Syndicated loan*	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Beberapa cicilan/*several installment* (2023-2027)	5	Tingkat suku bunga sebesar SOFR 3 bulan ditambah margin 1,00%/ *Interest rate of 3 months average SOFR plus margin 1.00%*	Fasilitas pinjaman ini adalah tanpa jaminan/ *This is an unsecured loan facility.*
Pinjaman Bank Sindikasi/ *Syndicated loan*	PT Bank SMBC Indonesia Tbk	Beberapa cicilan/*several installment* (2023-2027)	5		
Pinjaman Bank Sindikasi/ *Syndicated loan*	PT Bank OCBC NISP Tbk	Beberapa cicilan/*several installment* (2023-2027)	5		
Pinjaman Bank Sindikasi/ *Syndicated loan*	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	Beberapa cicilan/*several installment* (2023-2027)	5		

26. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

26. LONG-TERM BANK LOANS (continued)

Perusahaan (lanjutan)

The Company (continued)

Informasi lain mengenai utang bank jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Other information in relation to long-term bank loans as of December 31, 2025 and 2024 are as follows: (continued)

Fasilitas Pinjaman/ ***Credit Facility***	**Kreditur/** ***Creditor***	**Jadwal Pembayaran/** ***Repayment Schedule***	**Jangka Waktu (Tahun)/** ***Period (Year)***	**Tingkat Bunga/** ***Interest Rates***	**Jaminan/** ***Collateral***
Perusahaan/*The Company*					
Pinjaman Bank Sindikasi/ *Syndicated loan*	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Beberapa cicilan/*several installment* (2024-2029)	5	Tingkat suku bunga sebesar JIBOR 3 bulan ditambah margin 0,30%/ *Interest rate of 3 months average JIBOR plus margin 0.30%*	Fasilitas pinjaman ini adalah tanpa jaminan/ *This is an unsecured loan facility.*
Pinjaman Bank Sindikasi/ *Syndicated loan*	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Beberapa cicilan/*several installment* (2024-2029)	5	Tingkat suku bunga sebesar SOFR 3 bulan ditambah margin 0,90%/ *Interest rate of 3 months average SOFR plus margin 0.90%*	
Pinjaman Bank Sindikasi/ *Syndicated loan*	PT Bank SMBC Indonesia Tbk	Beberapa cicilan/*several installment* (2024-2029)	5		
Pinjaman Bank Sindikasi/ *Syndicated loan*	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Beberapa cicilan/*several installment* (2024-2029)	5	Tingkat suku bunga sebesar SOFR 3 bulan ditambah margin 1,00%/ Interest rate of 3 months average SOFR plus margin 1.00%	Fasilitas pinjaman ini adalah tanpa jaminan/ *This is an unsecured loan facility.*
Pinjaman Bank Sindikasi/ *Syndicated loan*	PT Bank Mega Tbk	Beberapa cicilan/*several installment* (2024-2029)	5		
Pinjaman Kredit/ *Credit loan*	Bank of China (Hong kong) Limited Jakarta Branch	Beberapa cicilan/*several installment* (2025-2030)	5	TIngkat suku bunga sebesar SOFR 3 bulan ditambah margin 0,90%/ Interest rate of 3 months average SOFR plus margin 0.90%	Fasilitas pinjaman ini adalah tanpa jaminan/ *This is an unsecured loan facility.*
Pinjaman Kredit/ *Credit loan*	PT Bank SMBC Indonesia Tbk	Beberapa cicilan/*several installment* (2025-2030)	5	Tingkat suku bunga sebesar SOFR 3 bulan ditambah margin 1,00%/ *Interest rate of 3 months average SOFR plus margin 1.00%*	Fasilitas pinjaman ini adalah tanpa jaminan/ *This is an unsecured loan facility.*

26. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2025, Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan rasio keuangan sebagaimana diatur dalam perjanjian pinjaman.

Lindung nilai arus kas

Proporsi dari pinjaman kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank SMBC Indonesia Tbk, PT Bank OCBC NISP Tbk, PT Bank Mega Tbk dan Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch sejumlah USD1.360.974.759 telah memenuhi kriteria dan berlaku efektif sebagai lindung nilai arus kas mulai 1 Juli 2023, 1 Januari 2025 dan 30 April 2025. Oleh karenanya, laba/rugi selisih kurs dari proporsi pinjaman tersebut dalam mata uang asing, masing-masing sebesar Rp363.303.894 dan Rp283.118.556 pada tahun 2025 dan 2024, dicatat sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lain. Penghasilan komprehensif lain tersebut akan terealisasi ke laba rugi hingga tahun 2027, 2029 dan 2030 sesuai dengan jatuh tempo masing-masing pinjaman tersebut. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, penghasilan komprehensif lain tersebut telah terealisasi ke laba rugi masing-masing sebesar Rp11.819.661 dan Rp26.576.794

BMS

Informasi lain mengenai utang bank jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

26. LONG-TERM BANK LOANS (continued)

The Company (continued)

As of December 31, 2025, the Company has complied all financial ratio covenants as stipulated in the loan agreement.

Cash flow hedge

Proportions of loans from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank SMBC Indonesia Tbk and PT Bank OCBC NISP Tbk, PT Bank Mega Tbk and Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch totalling to USD1,360,974,759 are designated as effective cash flow hedges starting July 1, 2023, January 1, 2025 and April 30, 2025. Therefore, the gain/loss on foreign exchange of proportions of syndicated bank loans denominated in foreign currency, amounting to Rp363,303,894 in 2025 and Rp283,118,556 in 2024 respectively, were reported as part of other comprehensive income. Such other comprehensive income will be recycled to profit or loss until 2027, 2029 and 2030 in accordance with the maturity of each loan. For the year ended December 31, 2025 and 2024, such other comprehensive income has been recycled to profit or loss amounted to Rp11,819,661 and Rp26,576,794, respectively.

BMS

Other information in relation to long-term bank loans as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

Fasilitas Pinjaman/ ***Credit Facility***	**Kreditur/** ***Creditor***	**Jadwal Pembayaran/** ***Repayment Schedule***	**Jangka Waktu (Tahun)/** ***Period (Year)***	**Tingkat Bunga/** ***Interest Rates***	**Jaminan/** ***Collateral***
BMS					
Fasilitas Kredit Bilateral/ *Bilateral Credit Facility*	PT Bank SMBC Indonesia Tbk	Beberapa cicilan/*several installment* (2022-2031)	9	6,70% p.a.	Pinjaman ini dijamin dengan Rekening Penampungan dan *debt service reserve account* (DSRA) (Catatan 4)/*This loan is guaranteed with Escrow Account and debt service reserve account (DSRA) (Note 4).*

Pada tanggal 31 Desember 2025, saldo pinjaman dari fasilitas ini sebesar Rp660.663.615. BMS telah memenuhi seluruh persyaratan rasio keuangan sebagaimana diatur dalam perjanjian pinjaman.

As of December 31, 2025, the outstanding loan from this facility amounted to Rp660,663,615. BMS has complied all financial ratio covenants as stipulated in the loan agreement.

26. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

26. LONG-TERM BANK LOANS (continued)

CTP

CTP

Informasi lain mengenai utang bank jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Other information in relation to long-term bank loans as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

Fasilitas Pinjaman/ *Credit Facility*	Kreditur/ *Creditor*	Jadwal Pembayaran/ *Repayment Schedule*	Jangka Waktu (Tahun)/ *Period (Year)*	Tingkat Bunga/ *Interest Rates*	Jaminan/ *Collateral*
CTP					
Pinjaman Bank Bilateral/ *Bilateral loan*	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Beberapa cicilan/*several installment* (2025-2040)	15	Tingkat suku bunga sebesar suku bunga deposito berjangka 1 bulan Bank Mandiri ditambah margin 4,45%/*Interest rate of 1-month Bank Mandiri time-deposit rate plus margin of 4.45%*	Pinjaman ini dijamin dengan hak konsesi, seluruh tagihan dan pendapatan jalan tol, gadai rekening penampungan, tagihan atas pendapatan dari klaim asuransi, bank garansi, dan penggantian dana dari pemerintah, gadai saham atas saham yang dimiliki oleh API di CTP, *letter of undertaking (LoU)* dari API, *letter of undertaking (LoU)* dari SPSL/ *This loan is secured by the concession rights, all toll road receivables and revenues, escrow account, receivables for insurance claim, bank guarantees, and government reimbursement funds, and pledge of shares over API shares in CTP, letter of Undertaking (LoU) from API, and letter of undertaking (LoU) from SPSL.*
Pinjaman Bank Sindikasi/ *Syndicated loan*	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Beberapa cicilan/*several installment* (2018-2033)	15	Periode sebelum 22 Juni 2023/*For the period before June 22, 2023:* *Tranche* A: periode konstruksi */construction period ATD+4.15% (min equiv. 6.80%)* *Tranche* B: periode konstruksi */construction period ATD+6.19% (min equiv. of 9.00%)* *Tranche* C: periode konstruksi */construction period ATD+4.15% (min equiv. of 6.80%)* Periode setelah 23 Juni 2023/*For the period after June 23, 2023:* *Tranche* A: periode operasional */operational period ATD+3.90% (min equiv. 6.55%)* *Tranche* B: Periode operasional/ *operational period ATD+5.94% (min equiv. of 9.00%)* *Tranche* C: periode operasional/ *operational period ATD+3.90% (min equiv. of 6.55%)*	Pinjaman ini dijamin dengan hak konsesi, seluruh tagihan dan pendapatan operasional, rekening penampung (Catatan 4), tagihan atas klaim asuransi, jaminan CTP dari API dan gadai atas saham yang dimiliki oleh API, surat pernyataan tetang kesediaan CHEDGTP menggunakan konsultan pengawas penggunaan kredit serta surat pernyataan Notaril dari API selaku pemegang saham CTP yang menyatakan turut serta menyelesaikan proyek, memenuhi kewajiban rasio-rasio keuangan yang diwajibkan kepada CTP dan API selaku pemegang saham akan meminta ijin terlebih dahulu kepada para kreditur melalui agen fasilitas apabila API akan melakukan divestasi / *This loan is secured by concession rights, all invoices and operating revenues, escrow accounts (Note 4), receivables for insurance claims, CTP's guarantee from API and pledge of shares owned by API, statement letter regarding CTP's willingness to use a consultant to supervise the use of credit and a notarial statement from API as a shareholder of CTP stating that he participates in completing the project, fulfills the financial ratios required of CTP and API as the shareholder will seek prior permission from the creditors through the facility agent if API will divest.*
Pinjaman Bank Sindikasi/ *Syndicated loan*	PT Bank CIMB Niaga Tbk	Beberapa cicilan/*several installment* (2018-2033)	15		
Pinjaman Bank Sindikasi/ *Syndicated loan*	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Beberapa cicilan/*several installment* (2018-2033)	15		
Pinjaman Bank Sindikasi/ *Syndicated loan*	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Beberapa cicilan/*several installment* (2018-2033)	15		
Pinjaman Bank Sindikasi/ *Syndicated loan*	PT Bank Pan Indonesia Tbk	Beberapa cicilan/*several installment* (2018-2033)	15		
Pinjaman Bank Sindikasi/ *Syndicated loan*	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	Beberapa cicilan/*several installment* (2018-2033)	15		
Pinjaman Bank Sindikasi/ *Syndicated loan*	PT Bank DKI	Beberapa cicilan/*several installment* (2018-2033)	15		

26. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

CTP (lanjutan)

Sesuai dengan perjanjian pinjaman, fasilitas-fasilitas tersebut mengharuskan Grup untuk memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya persyaratan rasio keuangan.

Berdasarkan Akta No. 24 tanggal 30 Agustus 2023 oleh notaris Ariani Lakhsmijati Rachim tentang perubahan keempat terhadap akta pernyataan kembali atas kredit sindikasi No. 31 tanggal 26 Februari 2019, CTP mendapatkan tambahan fasilitas kredit *Tranche* C dengan limit maksimal sebesar Rp930.000.000 dari kreditur PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dan PT Bank DKI masing-masing sebesar Rp519.870.000, Rp205.065.000 dan Rp205.065.000.

Berdasarkan surat pemberitahuan keterangan lunas dan instruksi pelepasan jaminan atas fasilitas kredit sindikasi CTP dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. SSF/5.1/828 tanggal 21 Maret 2025, CTP telah melakukan pelunasan atas fasilitas kredit investasi untuk Pembangunan jalan tol ruas Cibitung - Tanjung Priok (Cilincing), dengan rincian sebagai berikut:

- *Tranche* A I sebesar Rp2.265.327.000
- *Tranche* A II sebesar Rp3.534.673.000
- *Tranche* C sebesar Rp930.000.000

Terhitung sejak 21 Maret 2025, CTP telah melakukan pelunasan penuh atas seluruh kewajiban pembayaran kembali yang dipercepat terkait fasilitas kredit investasi. Sehubungan dengan hal tersebut, fasilitas kredit tersebut dinyatakan lunas sesuai dengan Perjanjian Kredit No. 45 tanggal 21 Desember 2018.

Fasilitas Kredit Investasi dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Berdasarkan Akta Notaris Perjanjian Kredit Bilateral No. 28 tanggal 21 Maret 2025 oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, antara CTP dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, CTP memperoleh fasilitas pinjaman sebesar Rp8.748.000.000. Fasilitas tersebut terbagi menjadi dua *tranche*, yaitu *tranche* A1 sebesar Rp8.648.000.000 dan *tranche* A2 sebesar Rp100.000.000. Jangka waktu dari fasilitas kredit investasi ini adalah 180 bulan sejak ditanda-tanganinya perjanjian kredit dan tidak memiliki masa tenggang (*grace period*).

26. LONG-TERM BANK LOANS (continued)

CTP (continued)

Based on the loan agreement, the facilities requires the Group to comply to certain requirement, among others financial ratios as stipulated in the Loan Agreement.

Based on Deed No. 24 dated August 30, 2023 by notary Ariani Lakhsmijati Rachim regarding the fourth amendment to the deed of restatement of syndicated loan No. 31 dated February 26, 2019, CTP obtained additional Tranche C credit facilities with a maximum limit of Rp930,000,000 from creditors PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk and PT Bank DKI amounting to Rp519,870,000, Rp205,065,000 and Rp205,065,000, respectively.

Based on the notification of loan settlement and the instruction for collateral release for the CTP syndicated credit facility issued by PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. SSF/5.1/828 dated March 21, 2025, CTP has completed the settlement of the investment credit facility for the construction of the Cibitung - Tanjung Priok (Cilincing) toll road section. The details are as follows:

- *Tranche A I amounting to Rp2,265,327,000*
- *Tranche A II amounting to Rp3,534,673,000*
- *Tranche C amounting to Rp930,000,000*

As of March 21, 2025, CTP has fully settled the accelerated repayment of all outstanding amounts under CTP investment credit facility. In relation to this matter, the Company's credit facility is hereby declared fully repaid in accordance with Credit Agreement No. 45 dated December 21, 2018.

Investment Credit Facility with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Based on the Bilateral Credit Agreement Notarial Deed No. 28 dated March 21, 2025 by Fathiah Helmi, S.H., a Notary in Jakarta, between CTP and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, CTP obtained a loan facility amounting to Rp8,748,000,000. The facility is divided into two tranches, namely Tranche A1 amounting to Rp8,648,000,000 and Tranche A2 amounting to Rp100,000,000. The investment credit facility has a tenor of 180 months from the date of execution of the credit agreement and does not include any grace period.

26. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan) / *26. LONG-TERM BANK LOANS (continued)*

CTP (lanjutan) / ***CTP (continued)***

Fasilitas Kredit Investasi dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (lanjutan)

Investment Credit Facility with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (continued)

Suku bunga atas fasilitas pinjaman ini ditetapkan berdasarkan suku bunga deposito berjangka 1 bulan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang diumumkan melalui situs resmi bank, ditambah margin sebesar 4,45% per tahun.

The interest rate applied to this loan facility is based on the one-month time deposit rate of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, as published on the bank's official website, plus a margin of 4.45% per annum.

Pada tanggal 31 Desember 2025, saldo pinjaman dari fasilitas ini sebesar Rp8.630.789.197.

As of December 31, 2025, the outstanding loan from this facility amounted to Rp8,630,789,197.

CTP juga diwajibkan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu selama periode perjanjian pembiayaan sebagai berikut:
- Rasio hutang terhadap ekuitas (DER) maksimum sebesar 5 kali.
- *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) minimum sebesar 1 kali.
- Memastikan ekuitas tetap positif.

CTP is also required to maintain certain financial ratios during the period of financing agreement as follows:
- *Maximum Debt Equity Ratio (DER) of 5 times.*
- *Minimum Debt Service Coverage Ratio (DSCR) of 1 time.*
- *Maintaining a positive equity position.*

Pada tanggal 31 Desember 2025, CTP telah memenuhi seluruh persyaratan rasio keuangan sebagaimana diatur dalam perjanjian pinjaman.

As of December 31, 2025, CTP has complied all financial ratio covenants as stipulated in the loan agreement.

27. UTANG LEMBAGA KEUANGAN NON-BANK / *27. LOAN FROM NON-BANK FINANCIAL INSTITUTION*

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
Rupiah			***Rupiah***
Pihak ketiga			*Third party*
PT Indonesia Infrastructure Finance	-	763.941.899	*PT Indonesia Infrastructure Finance*
Pihak berelasi (Catatan 44k)			*Related party (Notes 44k)*
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	-	1.502.045.095	*PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)*
Total	**-**	**2.265.986.994**	***Total***

CTP / ***CTP***

Berdasarkan Akta Notaris Perjanjian Kredit Sindikasi No. 45 tanggal 21 Desember 2018 oleh Ariani L. Rachim, S.H., Notaris di Jakarta yang dinyatakan kembali berdasarkan akta Pernyataan Kembali atas Akta Notaris Perjanjian Kredit Sindikasi No. 31 tanggal 26 Februari 2019 oleh Ariani L. Rachim, S.H., Notaris di Jakarta. CTP telah menandatangani Perjanjian Kredit Sindikasi dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Tbk ("SMI") dan lembaga keuangan perbankan lainnya (Catatan 24) dimana SMI menjadi kreditur fasilitas *Tranche* B yang bersifat Subordinasi.

Based on the Syndicated Credit Agreement Notarial Deed No. 45 dated December 21, 2018 by Ariani L. Rachim, S.H., a Notary in Jakarta which was restated based on the deed of Restatement of the Syndicated Credit Agreement Notarial Deed No. 31 dated February 26, 2019 by Ariani L. Rachim, S.H., a Notary in Jakarta. CTP entered into a Loan Syndicated with PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Tbk ("SMI") and other banking financial institution (Note 24) in which SMI is the creditor of the Subordinated Tranche B facility.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

27. UTANG LEMBAGA KEUANGAN NON-BANK (lanjutan)

CTP (lanjutan)

Sesuai keputusan Kreditur Sindikasi untuk partisipasi dalam pembiayaan sindikasi CTP untuk keperluan Kredit Investasi pembiayaan pembangunan memiliki limit fasilitas kredit investasi sebesar Rp7.404.162.000, dimana limit fasilitas kredit *tranche* B sebesar Rp1.000.000.000 dengan jangka waktu maksimum 180 bulan sejak penandatanganan perjanjian kredit termasuk *grace period* dengan suku bunga masa konstruksi adalah *Reference Rate* + *Margin eqv*. 12,50% untuk *Tranche* B yang bersifat Subordinasi.

Berdasarkan Pemberitahuan Pernyataan Penundukan Diri tertanggal 22 Oktober 2019, dinyatakan bahwa PT Indonesia Infrastructure Finance (“IIF”) selaku kreditur baru telah bergabung dengan pola *incremental option* dan telah menjadi salah satu kreditur untuk fasilitas *Tranche* B dalam Perjanjian Kredit dengan limit pinjaman Rp521.248.000.

Pada tanggal 17 Desember 2019, para pihak sepakat untuk melakukan perubahan pertama terhadap Akta Pernyataan Kembali atas Perjanjian Kredit Sindikasi No. 31 Tanggal 26 Februari 2019, dimana para pihak sepakat untuk merubah limit fasilitas kredit investasi menjadi maksimal sebesar Rp7.321.248.000 dengan limit fasilitas kredit *Tranche* B sebesar Rp1.521.248.000.

Berdasarkan surat Agen Fasilitas nomor SSK/3.2/1528 tanggal 9 Juni 2022, perihal perubahan masa penarikan fasilitas kredit CTP, para pihak sepakat untuk mengubah jangka waktu penarikan *Tranche* A dan B sampai dengan tanggal 30 September 2023 (57 bulan sejak tanggal perjanjian ini) atau paling lambat 9 bulan sejak tanggal pengoperasian keseluruhan proyek, mana yang lebih dulu terjadi.

Perjanjian kredit sindikasi telah mengalami perubahan ke-empat melalui Akta Nomor 24 tanggal 30 Agustus 2023 pada akta pernyataan kembali atas Perjanjian Kredit Sindikasi Nomor 31 Tanggal 26 Februari 2019. Akta perubahan keempat tersebut mencakup penyesuaian tingkat suku bunga fasilitas kredit *Tranche* B selama masa konstruksi dari ATD+6,94% (equiv.9,48%) menjadi ATD+6,19% (min equiv. sebesar 9%) dan selama masa operasi dari ATD+6,69% (equiv. 9,23%) menjadi ATD+5,94% (min equiv. sebesar 9%).

27. LOAN FROM NON-BANK FINANCIAL INSTITUTION (continued)

CTP (continued)

In accordance with the decision of the Syndicated Creditor for participation in the syndicated financing of CTP for the purpose of development financing investment has an Investment Credit facility limit of Rp7,404,162,000, which the credit facility limit of tranche B is Rp1,000,000,000 with a maximum period of 180 months from the signing of the credit agreement including grace period with the construction interest rate is the Reference Rate + Margin eqv. 12.50% for Tranche B which is Subordinated.

Based on the Notification of Self-Submission Statement dated October 22, 2019, it was stated that PT Indonesia Infrastructure Finance ("IIF") as a new creditor had joined the incremental option pattern and had become one of the creditors for Tranche B facilities in the Credit Agreement with a loan limit of Rp521,248,000.

On December 17, 2019, the parties agreed to make the first amendment to the Deed of Restatement of Syndicated Credit Agreement No. 31 Dated February 26, 2019, where the parties agreed to change the investment credit facility limit to a maximum of Rp7,321,248,000 with credit facility limit of Tranche B is Rp1,521,248,000.

Based on the Facility Agent's letter number SSK/3.2/1528 dated June 9, 2022, regarding the Amendment of Withdrawal Period of CTP Credit Facility, the parties agreed to amend the withdrawal period of Tranche A and B until September 30, 2023 (57 months from the date of this agreement) or no later than 9 months from the date of operation of the entire project, whichever occurs first.

The Syndicated Credit Agreement has enacted the fourth Amendment through Deed Number 24 dated August 30, 2023, which pertains to the restatement deed of Syndicated Credit Agreement Number 31 dated February 26, 2019. This amendment incorporates an adjustment to the interest rate for the Tranche B credit facility during the construction phase from ATD+6.94% (equiv. 9.48%) to ATD+6.19% (min equiv. 9%). Additionally, during the operational phase, the rate is adjusted from ATD+6.69% (equiv. 9.23%) to ATD+5.94% (min equiv. 9%).

27. UTANG LEMBAGA KEUANGAN NON-BANK (lanjutan)

CTP (lanjutan)

Pelunasan Fasilitas Kredit Sindikasi

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Keterangan Lunas dan Instruksi Pelepasan Jaminan atas Fasilitas Kredit Sindikasi Perusahaan dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan surat nomor SSF/5/1/828 tanggal 21 Maret 2025, CTP telah melakukan pelunasan atas fasilitas kredit investasi untuk pembangunan jalan tol ruas Cibitung - Tanjung Priok (Cilincing), dengan rincian sebagai berikut:

- *Tranche* B I senilai Rp637.900.000;
- *Tranche* B II senilai Rp883.348.000;

Terhitung sejak tanggal 21 Maret 2025 tersebut, CTP telah membayar penuh jumlah pembayaran kembali dipercepat atas seluruh jumlah yang harus dibayar pada fasilitas kredit investasi Perusahaan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka fasilitas kredit CTP dinyatakan lunas sesuai dengan Perjanjian Kredit No. 45 tanggal 21 Desember 2018.

27. LOAN FROM NON-BANK FINANCIAL INSTITUTION (continued)

CTP (continued)

Repayment of Syndicated Credit Facility

Based on the Notification of Loan Settlement and Collateral Release Instruction Letter for the Company's Syndicated Credit Facility from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, as stated in letter number SSF/5/1/828 dated March 21, 2025, CTP has completed the repayment of the investment credit facility for the construction of the Cibitung - Tanjung Priok (Cilincing) toll road segment, with the following details:

- *Tranche B I amounted to Rp637.900.000;*
- *Tranche B II amounted to Rp883.348.000;*

As of March 21, 2025, CTP has fully settled the accelerated repayment of all outstanding amounts under the Company's investment credit facility. In relation to this matter, the Company's credit facility is declared fully repaid in accordance with Credit Agreement No.45 dated December 21, 2018.

28. LIABILITAS KONTRAK JANGKA PANJANG / *28. LONG-TERM CONTRACT LIABILITIES*

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
Sewa tanah dan/atau bangunan	2.522.384.030	2.372.621.819	*Land and/or building rental*
Premium JICT (Catatan 49h)	1.713.193.638	1.713.193.638	*JICT Premium (Note 49h)*
Sewa diterima di muka - NPCT1 (Catatan 49c)	987.452.053	1.049.824.033	*Advance rental fee - NPCT1 (Note 49c)*
Premium TPK Koja (Catatan 49d)	374.428.125	374.428.125	*TPK Koja Premium (Note 49d)*
Total	5.597.457.846	5.510.067.615	*Total*
Bagian lancar (Catatan 21)	(528.166.386)	(346.049.722)	*Current portion (Note 21)*
Total bagian jangka panjang	**5.069.291.460**	**5.164.017.893**	***Total long-term portion***

29. LIABILITAS JANGKA PANJANG LAINNYA / *29. OTHER LONG-TERM LIABILITIES*

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
Pihak ketiga			*Third parties*
Provisi pemeliharaan terminal	636.507.335	495.013.816	*Provison for terminal maintenance*
Sea Terminal Management and Service Pte. Ltd., Singapura	271.648.254	261.955.899	*Sea Terminal Management and Services Pte. Ltd., Singapura*
Provisi pemeliharaan jalan tol	18.165.924	32.437.296	*Provison for toll road maintenance*
Lain-lain	29.086.183	11.952.330	*Others*
Sub-total pihak ketiga	955.407.696	801.359.341	*Sub-total third parties*
Pihak berelasi (Catatan 44l)	23.965	18.722.028	*Related parties (Note 44l)*
Total	**955.431.661**	**820.081.369**	***Total***

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

29. LIABILITAS JANGKA PANJANG LAINNYA (lanjutan)

Utang kepada Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd. ("STMS"), merupakan pinjaman sebesar USD15.096.000 yang diperoleh dan digunakan untuk setoran modal IPC TPK di NPCT1 berikut bunga terhutang (Catatan 49j).

Provisi pemeliharaan terminal dan jalan tol merupakan provisi atas pemeliharaan terminal dan jalan tol terkait penerapan ISAK 112 tentang Perjanjian Konsesi Jasa (Catatan 48a).

29. OTHER LONG-TERM LIABILITIES (continued)

Payable to Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd. ("STMS"), represents loan amounting to USD15,096,000 which was obtained and used by IPC TPK for acquisition of share capital in NPCT1 including the interest payable (Note 49j).

Provisons of terminal and toll road maintenance represent provision terminal maintenance and toll road to application of ISAK 112 regarding Concession Arrangement (Note 48a).

30. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Grup mencatat liabilitas imbalan kerja karyawan berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh aktuaris independen, Kantor Konsultan Aktuaria Halim dan Rekan, Kantor Konsultan Aktuaria Syamsuddin B. Salam, Kantor Konsultan Aktuaria Enny Diah Awal, Kantor Konsultan Aktuaria Hanung Budiarto dan Rekan, Kantor Konsultan Aktuaria Yusi dan Rekan, PT Emerald Delta Consulting, Kantor Konsultan Aktuaria Nandi Kusnadi FSAI, Kantor Konsultan Aktuaria Arya Bagiastra, Kantor Konsultan Aktuaria Santhi Devi dan Ardianto Handoyo, Kantor Konsultan Aktuaria Tubagus Syafrial dan Amran Nangasan, dan Kantor Konsultan Aktuaria Riana dan Rekan, dengan menggunakan metode "*Projected Unit Credit*".

30. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES

As of December 31, 2025 and 2024, the Group recorded employee benefits liabilities based on actuarial computations performed by independent actuaries, Actuarial Consultant Halim and Partners, Actuarial Consultant Syamsuddin B. Salam, Actuarial Consultant Enny Diah Awal, Actuarial Consultant Hanung Budiarto and Partners, Actuarial Consultant Yusi and Partners, PT Emerald Delta Consulting, Actuarial Consultant Nandi Kusnadi FSAI, Actuarial Consultant Arya Bagiastra, Actuarial Consultant Santhi Devi and Ardianto Handoyo, Actuarial Consultant Tubagus Syafrial and Amran Nangasan, and Actuarial Consultant Riana and Partners using the "Projected Unit Credit" method.

Berikut adalah asumsi-asumsi penting yang digunakan dalam laporan aktuaris independen:

The basic assumptions used by the independent actuaries are as follows:

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	**31 Desember 2024/ *December 31, 2024***	
Tingkat diskonto	4,58% - 7,83%	6,37% - 7,83%	*Discount rate*
Tingkat proyeksi kenaikan gaji	1,00% - 9,00%	2,00% - 10,00%	*Salary increase projection rate*
Tingkat mortalitas	TMI IV 2019 & GAM 71	TMI 2019 & TMI IV 2019	*Mortality rate*
Tingkat cacat tetap	0,02% - 10%	0,02% - 10%	*Permanent disability rate*
Tingkat pengunduran diri	1,00% - 10,00% untuk karyawan dibawah 30 tahun dan akan menurun sampai 0% pada usia 45 - 56 tahun/ *1.00% - 10.00% for employees under 30 years old will decrease to 0% at 45 - 56 years old*		*Level of resignation*
Tren biaya kesehatan	7,00%	4,88%	*Medical trend cost*
Tingkat kenaikan harga emas	5,00% - 9,32%	5,00%- 10,68%	*Gold price growth rate*
Usia pensiun normal	55 - 58 tahun	55 - 58 tahun	*Normal pension age*

30. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

30. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

Liabilitas imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:

The employee benefit liabilities are as follows:

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
Perusahaan			***The Company***
Program pensiun	98.614.515	-	*Pension program*
Program penghargaan masa bhakti	2.774.681.009	2.345.278.696	*Gratuity and compensation benefits*
Program kesehatan pensiunan	4.621.252.200	2.789.538.919	*Pension healthcare program*
Imbalan kerja jangka panjang lainnya	102.457.748	118.464.917	*Other long-term employee benefits*
Sub-total	7.597.005.472	5.253.282.532	*Sub-total*
Entitas anak			***Subsidiaries***
Program pensiun, penghargaan masa bhakti dan imbalan pasca-kerja lainnya	503.005.627	518.894.763	*Pension program, gratuity and compensation benefits and other post-benefits program*
Total	**8.100.011.099**	**5.772.177.295**	***Total***
Dikurangi: bagian jangka pendek	(429.519.134)	(463.764.537)	*Less: short-term portion*
Bagian jangka panjang	**7.670.491.965**	**5.308.412.758**	***Long-term portion***

a. Program Pensiun

Perusahaan menyelenggarakan program imbalan pensiun untuk karyawan tetap yang dipekerjakan pada tahun 2001 dan sebelumnya dan dikelola oleh Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan ("DP4") dan untuk yang dipekerjakan sejak tahun 2004 dikelola oleh Dana Pensiun Pelindo Purnakarya ("DP3").

Liabilitas imbalan kerja dan pencadangan biaya imbalan kerja atas program pensiun ini adalah sebagai berikut:

a. Pension Program

The company has a pension benefit plan covering permanent employees hired in and before 2001 and managed by Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan ("DP4") and for employees hired with permanent status since 2004 managed by Dana Pensiun Pelindo Purnakarya ("DP3").

Employee benefits liabilities and employee benefits expenses for the pension program are as follows:

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
Nilai kini liabilitas	1.397.542.494	901.704.503	*Present value of liabilities*
Nilai wajar aset program	(1.298.927.979)	(1.125.787.782)	*Fair value of plan assets*
Defisit program	98.614.515	(224.083.279)	*Deficit in plan*
Dampak batas atas aset	-	224.083.279	*Effect of asset ceiling*
Liabilitas yang diakui	**98.614.515**	**-**	***Recognized liabilities***

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

30. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan) / *30. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)*

a. Program Pensiun (lanjutan) / *a. Pension Program (continued)*

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Biaya jasa kini	6.515.907	10.851.121	*Current service cost*
Biaya jasa lalu	-	4.849.965	*Past service cost*
Biaya bunga	58.921.849	62.979.243	*Interest cost-net*
Pendapatan bunga aset program	(81.902.892)	(73.831.734)	*Interest income on plan asset*
Bunga aset ceiling	15.865.096	9.728.166	*asset ceiling interest*
Beban yang diakui	**(600.040)**	**14.576.761**	***Recognized expense***

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	**31 Desember 2024/ *December 31, 2024***	
Liabilitas awal tahun	-	-	*Liabilities at beginning of year*
Beban yang diakui dalam laba rugi	(600.040)	14.576.761	*Expense recognized in profit or loss*
Penghasilan komprehensif lain	298.717.669	105.811.170	*Other comprehensive income*
Iuran pemberi kerja	(199.503.114)	(120.387.931)	*Employer's contributions*
Pembayaran manfaat	-	-	*Benefits payment*
Liabilitas akhir tahun	**98.614.515**	**-**	***Liabilities at end of year***

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	**31 Desember 2024/ *December 31, 2024***	
			Present value of liabilities
Nilai kini liabilitas - awal tahun	901.704.503	955.630.483	*- beginning of year*
Biaya jasa kini	6.515.907	10.851.121	*Current service cost*
Biaya jasa lalu	-	4.849.965	*Past service cost*
Iuran peserta program	1.512.330	1.552.042	*Plan participants contributions*
Biaya bunga	58.921.849	62.979.243	*Bond interest costs*
Pembayaran manfaat	(138.949.981)	(140.193.803)	*Benefits payment*
Kerugian aktuarial	567.837.886	6.035.452	*Actuarial loss*
Nilai kini liabilitas - akhir tahun	**1.397.542.494**	**901.704.503**	***Present value of liabilities - end of year***

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	**31 Desember 2024/ *December 31, 2024***	
Nilai wajar aset program - awal tahun	1.125.787.782	1.100.657.944	*Fair value of program assets - beginning of year*
Pendapatan bunga atas aset program	81.902.892	73.831.734	*Interest income on plan asset*
Iuran pemberi kerja	199.503.114	120.335.911	*Employer's contributions*
Iuran peserta program	1.512.330	1.552.042	*Plan participants contributions*
Pembayaran manfaat	(138.949.981)	(140.193.803)	*Benefits payment*
Imbal hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas/aset imbalan pasti- neto	29.171.842	(30.396.046)	*The return on plan assets, excluding amounts included in net interest on the net defined benefit liability/asset*
Nilai wajar aset program - akhir tahun	**1.298.927.979**	**1.125.787.782**	***Fair value of program assets - end of year***

30. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan) / *30. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)*

a. Program Pensiun (lanjutan) / *a. Pension Program (continued)*

Aset program yang dimiliki oleh Grup adalah sebagai berikut:

- Properti 18,78%
- Reksa Dana 30,42%
- Investasi Saham 0,69%
- Obligasi 41,53%
- Deposito berjangka 5,59%
- Penyertaan langsung 2,99%

Plan assets owned by the Group is as follows:

- *Property 18.78%*
- *Mutual Funds 30.42%*
- *Investment in Shares 0.69%*
- *Bonds 41.53%*
- *Time Deposits 5.59%*
- *Direct Investment 2.99%*

Rincian liabilitas imbalan kerja di laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

The details of the employee benefit liabilities in the consolidated statements of financial position based on the maturity date as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	**31 Desember 2024/ *December 31, 2024***	
Jatuh tempo <= 1 tahun	137.808.182	725.422.283	*Maturity <= 1 year*
Jatuh tempo > 1 tahun sampai <= 5 tahun	663.806.569	178.573.813	*Maturity > 1 year up to <= 5 years*
Jatuh tempo > 5 tahun	1.867.723.836	130.249.827	*Maturity > 5 years*
Total	**2.669.338.587**	**1.034.245.923**	***Total***

Perubahan satu poin persentase asumsi tingkat diskonto akan memiliki efek pada tahun 2025 sebagai berikut:

A one percentage point change in the assumed discount rate would have the following effects in 2025:

	Kenaikan/ *Increase*	**Penurunan/ *Decrease***	
Nilai kini liabilitas	1.298.549.350	1.511.624.762	*Present value of liabilities*

Perubahan satu poin persentase asumsi tingkat kenaikan gaji akan memiliki efek pada tahun 2025 sebagai berikut:

A one percentage point change in the assumed discount rate would have the following effects in 2025:

	Kenaikan/ *Increase*	**Penurunan/ *Decrease***	
Nilai kini liabilitas	1.406.981.478	1.388.515.594	*Present value of liabilities*

b. Penghargaan masa bhakti / *b. Gratuity and compensation benefits*

Manfaat yang diperhitungkan dalam penghargaan masa bhakti mengacu kepada Perjanjian Kerja Bersama dan Peraturan Dana Pensiun. Peserta adalah seluruh pegawai tetap grup dengan definisi gaji yang meliputi gaji merit dan tunjangan perumahan. Program ini tidak didanai.

Benefits that are calculated in the gratuity and compensation benefits refer to the Collective Labor Agreement and the Regulations of the Pension Fund. Participants are all permanent employees of the group with the salary definition including merit pay and housing allowance. This program is not funded.

30. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan) / *30. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)*

b. Penghargaan masa bhakti (lanjutan) / *b. Gratuity and compensation benefits (continued)*

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
	2025	2024	
Nilai kini liabilitas	2.774.681.009	2.345.296.591	*Present value of liabilities*
Nilai wajar aset program	-	(17.895)	*Fair value of plan assets*
Liabilitas yang diakui	**2.774.681.009**	**2.345.278.696**	***Recognized liabilities***

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
	2025	2024	
Biaya jasa kini	165.202.973	150.137.384	*Current service cost*
Biaya bunga	164.790.173	142.472.001	*Interest cost-net*
Biaya jasa lalu	-	90.575.144	*Past service cost*
Beban yang diakui	**329.993.146**	**383.184.529**	***Recognized expense***

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
Liabilitas awal tahun	2.345.278.696	2.235.319.381	*Liabilities at beginning of year*
Beban yang diakui dalam laba rugi	329.993.146	383.184.529	*Expense recognized in profit or loss*
(Laba) Rugi komprehensif lain	263.195.147	(141.042.738)	*Other comprehensive loss (income)*
Pembayaran imbalan tahun berjalan	(163.785.980)	(132.182.476)	*Current year benefit payment*
Liabilitas akhir tahun	**2.774.681.009**	**2.345.278.696**	***Liabilities at end of year***

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
Nilai kini liabilitas - awal tahun	2.345.296.591	2.235.336.386	*Present value of liabilities - beginning of year*
Biaya jasa kini	165.202.973	150.137.384	*Current service cost*
Biaya bunga	164.790.173	142.473.142	*Interest cost*
Biaya jasa lalu	-	90.575.144	*Past service cost*
Pembayaran manfaat dari pemberi kerja	(163.785.980)	(132.182.476)	*Payment of benefits from the employer*
Kerugian (keuntungan) aktuarial	263.177.252	(141.042.989)	*Actuarial loss (gain)*
Nilai kini liabilitas akhir tahun	**2.774.681.009**	**2.345.296.591**	***Present value of liabilities - end of year***

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
Nilai wajar aset program awal tahun	17.895	17.005	*Fair value of program assets - beginning of year*
Pendapatan bunga atas aset program	-	1.141	*Interest income on program assets*
Imbal hasil atas aset program tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto	(17.895)	(251)	*The return on plan assets, excluding amounts included in net interest on the net defined benefit liability (asset)*
Nilai wajar aset program akhir tahun	**-**	**17.895**	***Fair value of program assets - end of year***

30. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan) / *30. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)*

b. Penghargaan masa bhakti (lanjutan) / *b. Gratuity and compensation benefits (continued)*

Rincian liabilitas imbalan kerja di laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

The details of the employee benefit liabilities in the consolidated statement of financial position based on the maturity date as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
Jatuh tempo <= 1 tahun	232.871.866	170.722.030	*Maturity <= 1 year*
Jatuh tempo > 1 tahun sampai <= 5 tahun	1.363.640.797	739.829.912	*Maturity > 1 year up to <= 5 years*
Jatuh tempo > 5 tahun	8.776.815.599	4.330.530.336	*Maturity > 5 years*
Total	**10.373.328.262**	**5.241.082.278**	***Total***

Perubahan satu poin persentase asumsi tingkat diskonto akan memiliki efek pada tahun 2025 sebagai berikut:

A one percentage point change in the assumed discount rate would have the following effects in 2025:

	Kenaikan/ *Increase*	Penurunan/ *Decrease*	
Nilai kini liabilitas	4.942.117.572	3.013.422.914	*Present value of liabilities*

Perubahan satu poin persentase asumsi tingkat kenaikan gaji akan memiliki efek pada tahun 2025 sebagai berikut:

A one percentage point change in the assumed discount rate would have the following effects in 2025:

	Kenaikan/ *Increase*	Penurunan/ *Decrease*	
Nilai kini liabilitas	3.005.485.916	2.572.452.643	*Present value of liabilities*

c. Program kesehatan pensiunan / *c. Pension healthcare program*

Perusahaan memberikan imbalan kerja berupa program kesehatan pensiunan dan keluarga. Program tersebut berupa bantuan pengobatan dari Perusahaan dalam jumlah tertentu dan telah terdaftar di Perusahaan. Program ini tidak didanai.

The Company also provides long term post-employment benefits in form of healthcare program for pensioners and family. The program is in the form of medical assistance from the Company in certain amounts and after registering with the Company. This program is not funded.

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
Nilai kini liabilitas	4.621.252.200	2.789.538.919	*Present value of liabilities*
Nilai wajar aset program	-	-	*Fair value of plan assets*
Liabilitas yang diakui	**4.621.252.200**	**2.789.538.919**	***Recognized liabilities***

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

30. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan) / *30. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)*

c. Program kesehatan pensiunan (lanjutan) / *c. Pension healthcare program (continued)*

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Biaya jasa:			*Service cost:*
- Biaya jasa kini	198.871.098	169.332.542	*Current service cost -*
- Biaya bunga	192.532.378	226.325.184	*Interest cost -*
Beban yang diakui	**391.403.476**	**395.657.726**	***Recognized expense***

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	**31 Desember 2024/ *December 31, 2024***	
Liabilitas awal tahun	2.789.538.919	3.415.466.823	*Liabilities at beginning of year*
Beban yang diakui dalam laba rugi	391.403.476	395.657.726	*Expense recognized in profit or loss*
Penghasilan komprehensif lain	1.580.619.900	(874.103.086)	*Other comprehensive income*
Pembayaran imbalan tahun berjalan	(140.310.095)	(147.482.544)	*Current year benefit payment*
Liabilitas akhir tahun	**4.621.252.200**	**2.789.538.919**	***Liabilities at end of year***

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	**31 Desember 2024/ *December 31, 2024***	
Nilai kini liabilitas - awal tahun	2.789.538.919	3.415.466.823	*Present value of liabilities - beginning of year*
Biaya jasa kini	198.871.098	169.332.542	*Current service cost*
Bunga atas kewajiban imbalan pasti	192.532.378	226.325.184	*Interest on the defined benefit obligation*
Pembayaran manfaat	(140.310.095)	(147.482.544)	*Benefit paid*
Kerugian (keuntungan) aktuarial	1.580.619.900	(874.103.086)	*Actuarial loss (gain)*
Nilai kini liabilitas akhir tahun	**4.621.252.200**	**2.789.538.919**	***Present value of liabilities - end of year***

Rincian liabilitas imbalan kerja di laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

The details of the employee benefit liabilities in the consolidated statement of financial position based on the maturity date as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	**31 Desember 2024/ *December 31, 2024***	
Jatuh tempo <= 1 tahun	147.185.241	173.317.879	*Maturity <= 1 year*
Jatuh tempo > 1 tahun sampai <= 5 tahun	897.331.891	544.790.037	*Maturity > 1 year up to <= 5 years*
Jatuh tempo > 5 tahun	39.903.928.203	5.503.367.802	*Maturity > 5 years*
Total	**40.948.445.335**	**6.221.475.718**	***Total***

30. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan) / *30. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)*

c. Program kesehatan pensiunan (lanjutan) / *c. Pension healthcare program (continued)*

Perubahan satu poin persentase asumsi tingkat diskonto akan memiliki efek pada tahun 2025 sebagai berikut:

A one percentage point change in the assumed discount rate would have the following effects in 2025:

	Kenaikan/ *Increase*	Penurunan/ *Decrease*	
Nilai kini liabilitas	3.912.013.876	5.546.274.369	*Present value of liabilities*

Perubahan satu poin persentase asumsi tingkat kenaikan gaji akan memiliki efek pada tahun 2025 sebagai berikut:

A one percentage point change in the assumed discount rate would have the following effects in 2025:

	Kenaikan/ *Increase*	Penurunan/ *Decrease*	
Nilai kini liabilitas	4.889.285.647	4.386.343.937	Present value of liabilities

d. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya / *d. Other long-term employee benefits*

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya berupa imbalan cuti besar merupakan manfaat yang diperhitungkan mengacu kepada Peraturan Perusahaan. Peserta adalah seluruh pegawai tetap perusahaan yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun secara terus menerus dan diberikan bantuan cuti besar sebesar 1 (satu) kali penghasilan tetap. Program ini tidak didanai.

Other long-term permanent employee benefits are in the form of long service leave benefits that are calculated in reference to the Company's Regulation. Participants include all employees that have worked at least 6 (six) years of continuous service and given assistance amounting to 1 (one) time the regular income. This program is not funded.

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
Nilai kini liabilitas	102.457.748	118.464.917	*Present value of liabilities*
Liabilitas yang diakui	**102.457.748**	**118.464.917**	***Recognized liabilities***

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
Biaya jasa kini	52.487.207	8.648.462	*Current service cost*
Biaya jasa lalu	-	(16.776)	*Past service cost*
Bunga atas kewajiban imbalan pasti		-	*Interest on the defined benefit obligation*
Bunga obligasi	3.481.225	5.372.560	*Bond interest*
Pengukuran kembali manfaat jangka panjang	-	-	*Remeasurement of long-term benefits*
Kerugian aktuarial bersih yang diakui pada tahun berjalan	(61.209.235)	26.195.905	*Net Actuarial Losses recognized in year*
Beban yang diakui	**(5.240.803)**	**40.200.151**	***Recognized expense***

30. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan) / *30. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)*

d. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya (lanjutan) / *d. Other long-term employee benefits (continued)*

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Liabilitas awal tahun	118.464.917	82.281.757	*Liabilities at beginning of year*
Beban yang diakui dalam laba rugi	(5.240.803)	40.200.151	*Expense recognized in profit or loss*
Beban (penghasilan) yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	-	-	*Expenses (income) that recognized in other comprehensive incomes*
Pembayaran imbalan tahun berjalan	(10.766.366)	(4.016.991)	*Current year benefit payment*
Liabilitas akhir tahun	**102.457.748**	**118.464.917**	***Liabilities at end of year***

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	**31 Desember 2024/ *December 31, 2024***	
Nilai kini liabilitas - awal tahun	118.464.917	82.281.757	*Present value of liabilities - beginning of year*
Biaya jasa kini	52.487.207	8.648.462	*Current service cost*
Biaya jasa lalu	-	(16.776)	*Past service cost*
Bunga atas kewajiban imbalan pasti	-	-	*Interest on the defined benefit obligation*
Bunga obligasi	3.481.225	5.372.560	*Bond interest*
Pembayaran manfaat	(10.766.366)	(4.016.991)	*Benefits payment*
Kerugian (keuntungan) aktuarial	(61.209.235)	26.195.905	*Actuarial loss (gain)*
Nilai kini liabilitas akhir tahun	**102.457.748**	**118.464.917**	***Present value of liabilities - end of year***

Rincian liabilitas imbalan kerja di laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

The details of the employee benefit liabilities in the consolidated statements of financial position based on the maturity date as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	**31 Desember 2024/ *December 31, 2024***	
Jatuh tempo <= 1 tahun	29.615.754	27.934.708	*Maturity <= 1 year*
Jatuh tempo > 1 tahun dan <= 5 tahun	167.388.600	48.795.684	*Maturity > 1 year and <= 5 years*
Jatuh tempo > 5 tahun	374.951.533	236.314.468	*Maturity > 5 years*
Total	**571.955.887**	**313.044.860**	***Total***

Perubahan satu poin persentase asumsi tingkat diskonto akan memiliki efek pada tahun 2025 sebagai berikut:

A one percentage point change in the assumed discount rate would have the following effects in 2025:

	Kenaikan/ *Increase*	**Penurunan/ *Decrease***	
Nilai kini liabilitas	101.155.227	103.807.451	*Present value of liabilities*

30. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

30. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

d. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya (lanjutan)

d. Other long-term employee benefits (continued)

Perubahan satu poin persentase asumsi tingkat kenaikan gaji akan memiliki efek pada tahun 2025 sebagai berikut:

A one percentage point change in the assumed discount rate would have the following effects in 2025:

	Kenaikan/ *Increase*	Penurunan/ *Decrease*	
Nilai kini liabilitas	103.950.839	100.993.019	*Present value of liabilities*

e. Program pensiun iuran pasti

e. Defined contribution plan

Grup menyediakan program pensiun iuran pasti untuk karyawan tetap yang dipekerjakan sejak tahun 2002. Iuran program tersebut dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (”DPLK”), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT AXA Mandiri Financial Services dan Dana Pensiun Pelindo Purnakarya (”DP3”). Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, iuran program yang dibayarkan Grup masing-masing sebesar Rp47.223.070 dan Rp41.553.842

The Group provides a defined contribution pension plan for employees hired with permanent status since 2002. The contribution plan is managed by Dana Pensiun Lembaga Keuangan (“DPLK”), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT AXA Mandiri Financial Services and Dana Pensiun Pelindo Purnakarya (”DP3”). For the year ended December 31, 2025 and 2024, the contribution plans established by the Group amounted to Rp47,223,070 and Rp41,553,842 respectively.

31. MODAL SAHAM

31. SHARE CAPITAL

Pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah:

The Shareholders of the Company as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	31 Desember/December 31, 2025			
Pemegang saham	**Total Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ *Number of Shares Issued and Fully Paid***	**Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership***	**Nominal/ *Amount***	***Shareholders***
Saham Seri A Dwiwarna				*Serie A Dwiwarna Share*
Badan Pengaturan BUMN	1	0,00%	1.000	*State-Owned Enterprises Regulatory Agency*
Saham biasa atas nama Seri B				*Serie B Common Shares*
DAM	40.575.583	100,00%	40.575.583.000	*DAM*
Total	**40.575.584**	**100,00%**	**40.575.584.000**	**Total**

	31 Desember/December 31, 2024			
Pemegang saham	**Total Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ *Number of Shares Issued and Fully Paid***	**Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership***	**Nominal/ *Amount***	***Shareholders***
Negara Republik Indonesia	40.575.584	100,00%	40.575.584.000	*Republic of Indonesia*

31. MODAL SAHAM (lanjutan)

Pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah: (lanjutan)

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham yang telah diaktakan dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 2 tanggal 15 Agustus 2008 dari Notaris Agus Sudiono Kuntjoro, S.H., modal dasar Perusahaan sebesar Rp4.000.000.000 terdiri dari 4.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Total modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp1.009.958.000 atau sebanyak 1.009.958 saham.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 58 Tahun 2011 tanggal 22 Desember 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan sebagai berikut:

1) Nilai penambahan penyertaan modal negara sebesar Rp7.652.976.
2) Penambahan penyertaan modal negara tersebut berasal dari pengalihan barang milik negara Kementerian Perhubungan berupa dermaga beton hasil kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan Sintete-Sambas, Kalimantan Barat, yang pengadaannya berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2011 tersebut di atas, diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perusahaan yang tertuang dalam Risalah RUPSLB No. RIS-269/MBU/S/2012 tanggal 18 Juli 2012 dengan keputusan sebagai berikut:

1) Menyetujui pengeluaran/penempatan saham yang masih dalam simpanan (*portepel*) sebesar 7.653 saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham sebesar Rp7.653.000 yang seluruhnya diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia.

2) Menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh milik Negara Republik Indonesia pada Perusahaan sebesar Rp7.653.000 melalui:

31. SHARE CAPITAL (continued)

The Shareholders of the Company as of December 31, 2025 and 2024 are as follows: (continued)

Based on General Meeting of Shareholders held on August 15, 2008 that was notarized through Notarial Deed No. 2 of Agus Sudiono Kuntjoro, S.H., the Company's authorized capital amounted to Rp4,000,000,000 divided into 4,000,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. Total issued and fully paid capital amounted to Rp1,009,958,000 divided into 1,009,958 shares.

Based on the Regulation of Government of The Republic of Indonesia No. 58 Year 2011 dated December 22, 2011 about Additional Participation Capital of The Republic of Indonesia in the Company as follows:

1) The additional share capital of the government amounted to Rp7,652,976.
2) Additional share capital by the government came from the transfer of concrete jetty owned by Ministry of Transportation as a result of port development activities in Sintete-Sambas, West Kalimantan, provided by Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (State Revenue and Expenditure Budget) in 2005.

Based on the Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 58 Year 2011, the Extraordinary General Shareholders Meeting of the Company was conducted as stipulated in the Minutes of Meeting No. RIS-269/MBU/S/2012 dated July 18, 2012 with decision as follows:

1) Approved the disbursement/placement of shares that were still in portfolio of 7,653 shares with nominal value of Rp1,000,000 (full amount) per share amounting to Rp7,653,000, which was fully taken by the Republic of Indonesia.

2) Approved additional paid-in capital of the Company owned by the Republic of Indonesia amounting to Rp7,653,000 through:

31. MODAL SAHAM (lanjutan)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2011 tersebut di atas, diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perusahaan yang tertuang dalam Risalah RUPSLB No. RIS-269/MBU/S/2012 tanggal 18 Juli 2012 dengan keputusan sebagai berikut: (lanjutan)

2) Menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh milik Negara Republik Indonesia pada Perusahaan sebesar Rp7.653.000 melalui: (lanjutan)
   a) Sebesar Rp7.652.976 merupakan penambahan penyertaan modal negara sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan;
   b) Sebesar Rp24 berasal dari kapitalisasi cadangan Perusahaan sebagaimana tercatat dalam Laporan Keuangan Tahun Buku 2011 yang telah diaudit oleh KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan sebagaimana dalam surat No. 020/LA-PL.II/V/12 tanggal 25 Mei 2012.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Menteri BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan yang diaktakan dalam Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., No. 03 tanggal 2 Agustus 2013, Pemerintah Negara Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri BUMN menambah penyertaan modal ke dalam Perusahaan sebesar Rp426.418.000 yang berasal dari pengalihan seluruh modal saham milik Negara RI pada Rukindo dalam rangka restrukturisasi Rukindo.

Dengan adanya penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia tersebut, maka modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan yang semula sebesar Rp1.017.611.000 menjadi sebesar Rp1.444.029.000.

31. SHARE CAPITAL (continued)

Based on the Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 58 Year 2011, the Extraordinary General Shareholders Meeting of the Company was conducted as stipulated in the Minutes of Meeting No. RIS-269/MBU/S/2012 dated July 18, 2012 with decision as follows:

2) Approved additional paid-in capital of the Company owned by the Republic of Indonesia amounting to Rp7,653,000 through: (continued)

   a) Rp7,652,976 as additional share capital of the government as stated in Government Regulation No. 58 Year 2011 regarding Additional Capital contribution by the Government of the Republic of Indonesia into the Company's share capital;

   b) Rp24 taken from the Company's reserve capitalization as stated in the 2011 financial statements audited by KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan through letter No. 020/LA-PL.II/V/12 dated May 25, 2012.

Based on the Deed of Minister of SOEs as the General Meeting of Shareholders of the Company as notarized in the Notarial Deed No. 03 of Notary Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., dated August 2, 2013, the Government of the Republic of Indonesia which in this case was represented by the Minister of SOEs increased its investment in the Company by Rp426,418,000 which was derived from the transfer of the entire share capital owned by the Republic of Indonesia in Rukindo for restructuring of Rukindo.

With the additional capital contribution by the Republic of Indonesia, the issued and fully paid capital of the Company changed from Rp1,017,611,000 to Rp1,444,029,000.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

31. MODAL SAHAM (lanjutan)

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan yang di aktakan dalam Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H. M.Kn. No. 09 tanggal 21 Agustus 2019, Pemerintah Negara Republik Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Menteri BUMN melakukan perubahan jenis saham yang semula tanpa seri menjadi terdiri dari saham Seri A Dwiwarna dan saham Seri B.

Dengan adanya perubahan jenis saham tersebut, modal dasar Perusahaan adalah sebesar Rp4.000.000.000 yang terdiri dari 4.000.000 lembar saham dan terbagi atas satu lembar saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (nilai penuh) dan 3.999.999 lembar saham Seri B, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (nilai penuh). Modal yang telah di ambil bagian dan disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia sebanyak Rp1.444.029.000 yang terdiri dari 1 lembar saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) dan 1.444.028 lembar saham Seri B, masing-masing dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh).

Pada tanggal 1 Oktober 2021, Perusahaan melakukan penggabungan dengan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I (“Pelindo I”), Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III (“Pelindo III”) dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV (“Pelindo IV”), dengan Perusahaan sebagai perusahaan hasil penggabungan (Catatan 1g).

Dengan adanya penggabungan tersebut, modal dasar Perusahaan adalah sebesar Rp33.000.000.000 yang terdiri dari 33.000.000 lembar saham dan terbagi atas satu lembar saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (nilai penuh) dan 32.999.999 lembar saham Seri B, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (nilai penuh). Modal yang telah di ambil bagian dan disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia sebanyak Rp8.475.067.000 yang terdiri dari 1 lembar saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) dan 8.475.066 lembar saham Seri B, masing-masing dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh).

31. SHARE CAPITAL (continued)

Based on Minister of SOEs Decree Statement as The General Meeting of Shareholders of the Company, which was notarized on Notarial Deed of Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn. No. 09 dated August 21, 2019, The Government of the Republic Indonesia , in this case represented by the Minister of SOEs, changed the types of shares that were originally without series became consisted of Series A Dwiwarna Shares and Series B shares.

With the changes in types of shares, Company’s authorized capital of the Company is Rp4,000,000,000 consisting of 4,000,000 shares and divided into one Series A Dwiwarna share with nominal value Rp1,000,000 (full amount) and 3,999,999 Series B shares, each with a nominal value of Rp1,000,000 (full amount). The capital that has been taken part and fully paid by The Republic of Indonesia as much as Rp1,444,029,000 consisting of 1 Series A Dwiwarna share with nominal value Rp1,000,000 (full amount) and 1,444,028 Series B share, each with nominal value of Rp1,000,000 (full amount).

On October 1, 2021, the Company merged with Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I (“Pelindo I”), Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III (“Pelindo III”) and Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV (“Pelindo IV”), with the Company as the surviving entity (Note 1g).

With such merger, the Company’s authorized capital of the company is Rp33,000,000,000 consisting of 33,000,000 shares and divided into 1 Series A Dwiwarna share with nominal value Rp1,000,000 (full amount) and 32,999,999 Series B shares, each with a nominal value of Rp1,000,000 (full amount). The capital that has been taken part and fully paid by The Republic of Indonesia as much as Rp8,475,067,000 consisting of 1 Series A Dwiwarna share with nominal value Rp1,000,000 (full amount) and 8,475,066 Series B share, each with nominal value of Rp1,000,000 (full amount).

31. MODAL SAHAM (lanjutan)

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Menteri BUMN Negara No. S-38/MBU/01/2022 yang diaktakan dalam Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., No. 02 tanggal 9 Februari 2022, Pemerintah Negara Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri BUMN melakukan perubahan struktur permodalan dan perubahan Anggaran Dasar.

Dengan adanya perubahan struktur permodalan tersebut, modal dasar perseroan adalah Rp156.000.000.000 yang terbagi atas 156.000.000 lembar saham dan terbagi atas satu lembar saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 dan 155.999.999 saham Seri B, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (nilai penuh). Modal yang telah diambil bagian dan disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia sebanyak Rp40.575.584.000 yang terdiri dari 1 lembar saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (nilai penuh) dan 40.575.583 saham seri B, masing-masing dengan nominal Rp1.000.000 (nilai penuh).

Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui suratnya No. AHU-0014773.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 1 Maret 2022.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2025 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia ("BKI") (yang per tanggal 5 Juni 2025 berganti nama menjadi PT Danantara Asset Management ("DAM")) untuk Pendirian Holding Operasional tanggal 21 Maret 2025, dan Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., No.4 tanggal 14 April 2025, Negara Republik Indonesia melakukan persetujuan pengalihan saham seri B milik Negara Republik Indonesia pada Perseroan kepada DAM sebanyak 40.575.583 lembar saham Seri B.

Setelah pengalihan seluruh saham Seri B tersebut, Negara Republik Indonesia tetap memiliki 1 lembar saham seri Dwiwarna serta pengendalian terhadap Perseroan. Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan tersebut telah diterima dan diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui suratnya No. AHU-AH.01.09-0188275 tanggal 15 April 2025.

31. SHARE CAPITAL (continued)

Based on Minister of SOEs Decree Statement as No. S-38/MBU/01/2022 which was notarized on Notarial Deed of Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn. No. 02 dated February 9, 2022, The Government of the Republic Indonesia , in this case represented by the Minister of SOEs, changed the company's capital structure and Articles of Association.

With the changes in capital structure, Company's authorized capital of the Company is Rp156,000,000,000 consisting of 156,000,000 shares and divided into 1 Series A Dwiwarna share with nominal value Rp1,000,000 (full amount) and 155,999,999 Series B shares, each with a nominal value of Rp1,000,000 (full amount). The capital that has been taken part and fully paid by The Republic of Indonesia as much as Rp40,575,584,000 consisting of 1 Series A Dwiwarna share with nominal value Rp1,000,000 (full amount) and 40,575,583 Series B share, each with nominal value of Rp1,000,000 (full amount).

The amendment to the Company's Articles of Association has obtained approval from the Ministry of Law and Human Rights through its letter No. AHU-0014773.AH.01.02.Year 2022 dated March 1, 2022.

Based on Government Regulation No. 15 Year 2025 concerning the Additional State Equity Participation of the Republic of Indonesia into the Share Capital of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) (which, as of June 5, 2025, has changed its name to PT Danantara Asset Management (DAM)) for the Establishment of an Operational Holding (Government Regulation No. 15 Year 2025 dated 21 March 2025), and Deed No. 4 dated April 14, 2025, drawn up by Notary Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., the Government of the Republic of Indonesia approved the transfer of its Series B shares in the Company to DAM, totaling 40,575,583 Series B shares.

Following the transfer of all Series B shares, the Republic of Indonesia retains 1 Dwiwarna Series A share and maintains control over the Company. The amendment to the Company's Articles of Association have been received and notified approval from the Ministry of Law and Human Rights through its letter No. AHU-AH.01.09-0188275 dated April 15, 2025.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

32. MODAL DONASI

Pada tahun 1997, Perusahaan memperoleh modal donasi berupa tanah dan gedung CDC dari Yayasan Sekar Laut masing-masing sebesar Rp1.820.092 dan Rp23.957.447.

Pada tahun 2009, Perusahaan memperoleh modal donasi berupa gedung stasiun pandu dari Pemerintah Daerah Cilegon sebesar Rp1.048.443.

32. DONATED CAPITAL

In 1997, the Company received donated capital in the form of land and CDC building from Yayasan Sekar Laut amounting to Rp1,820,092 and Rp23,957,447, respectively.

In 2009, the Company received donated capital in form of pilotage station building from the Local Government of Cilegon amounting to Rp1,048,443.

33. TAMBAHAN MODAL DISETOR / *33. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL*

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
Selisih nilai transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali			*Difference in value of business combination transaction of entities und common control*
PHC	239.860.000	239.860.000	*PHC*
RSP	134.385.547	134.385.547	*RSP*
BMS	38.697.264	38.697.264	*BMS*
APBS	33.152.625	33.152.625	*APBS*
MMI	(8.565.613)	(8.565.613)	*MMI*
ILCS	(21.792.779)	(21.792.779)	*ILCS*
PMS	(34.886.436)	(34.886.436)	*PMS*
PMT (Catatan 1d)	(55.682.866)	(55.682.866)	*PMT (Note 1d)*
PTP1 (Catatan 1d)	(73.525.686)	(73.525.686)	*PTP1 (Note 1d)*
Rukindo	(317.597.475)	(317.597.475)	*Rukindo*
TPS	(514.813.986)	(514.813.986)	*TPS*
CTP (Catatan 1d)	(1.203.895.262)	(1.203.895.262)	*CTP (Note 1d)*
Transaksi penggabungan entitas sepengendali (Catatan 1g)	(32.100.517.000)	(32.100.517.000)	*Merger transactions of entities under common control (Note 1g)*
Pengalihan barang milik negara			*Transfer of government's assets*
Fasilitas Pelabuhan Dumai	414.128.745	414.128.745	*Dumai Port Facility*
2 (dua) unit kapal tunda di Pelabuhan Malahayati dan Pelabuhan Lhokseumawe	53.560.436	53.560.436	*2 (two) units of tugboat in Malahayati and Lhokseumawe Port*
Dermaga Gunung Sitoli	37.991.647	37.991.647	*Gunung Sitoli Jetty*
Fasilitas Pelabuhan Gunung Sitoli	19.203.989	19.203.989	*Gunung Sitoli Port Facility*
3 (tiga) unit forklift 3 ton dan 3 (tiga) unit forklift 5 ton di Pelabuhan Malahayati	1.686.300	1.686.300	*3 (three) unit of 3 ton forklift and 3 (three) unit of 5 ton forklift in Malahayati Port*
1 (satu) unit forklift 3 ton dan 1 (satu) unit forklift 5 ton di Pelabuhan Gunung Sitoli	562.100	562.100	*1 (one) unit of 3 ton forklift and 1 (one) unit of 5 ton forklift in Gunung Sitoli Port*
Total	**(33.358.048.450)**	**(33.358.048.450)**	***Total***

33. TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan)

a. Penambahan modal berdasarkan penetapan nilai definitif sebesar Rp32.100.517.000 merupakan selisih nilai kekayaan definitif Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV sejumlah Rp39.131.554.121 yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 29 Desember 2021 dengan nilai modal saham Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV pada saat penggabungan ke dalam Perusahaan, yaitu sebesar Rp7.031.038.000 (Catatan 1g). Penambahan modal tersebut akan dicatat sebagai modal saham pada saat telah disetujui dalam RUPS dan telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

   Transaksi penggabungan tersebut di atas menimbulkan selisih nilai transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali sebesar Rp32.100.517.000 sesuai dengan metode penyatuan kepemilikan (Catatan 1g).

b. Pada tanggal 2 Agustus 2013, Perusahaan menerima pengalihan seluruh saham Rukindo milik Pemerintah Negara Republik Indonesia dengan nilai pengalihan sebesar Rp426.418.000. Atas pengalihan tersebut, Perusahaan memiliki 100% saham Rukindo.

   Selisih antara nilai pengalihan dan nilai tercatat aset neto dicatat sebagai selisih nilai transaksi bisnis kombinasi entitas sepengendali sebagai bagian dari akun tambahan modal disetor, dengan perhitungan sebagai berikut:

Aset neto Rukindo pada tanggal pengalihan	108.820.525
Nilai pengalihan	426.418.000
Selisih nilai transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali	**(317.597.475)**

33. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL (continued)

a. Additional capital based on determination of definitive value amounting to Rp32,100,517,000 represents difference of definitive net assets value of Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV totalling to Rp39,131,554,121, which have been determined by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia on December 29, 2021, with the share capital of Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV at the time of merger to the Company, which amounting to Rp7,031,038,000 (Note 1g). The additional capital will be recorded as share capital upon approval of GMS and upon approval from the Ministry of Law and Human Rights of The Republic of Indonesia.
The merger transaction as stated above created the difference in value of business combination transaction of entities under common control amounting to Rp32,100,517,000 in accordance with the pooling of interest method (Note 1g).

b. On August 2, 2013, the Company received the transfer of all of Rukindo's shares owned by the Government of the Republic of Indonesia amounting to Rp426,418,000. After the transfer, the Company owned 100% shares of Rukindo.

Difference between transfer prices and the carrying value of net assets is recorded as difference arising from business combination of entites under common control as part of paid in capital account is as follows:

Net assets of Rukindo as of transfer date	
Transfer amount	
Difference arising from business combination of entites under common control	

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

33. TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan)

c. Berdasarkan Perjanjian Pengambilan Saham Bersyarat pada tanggal 30 Juni 2020, PBM IHC melakukan pengambilalihan 103.166 lembar saham RSP yang dimiliki oleh Perusahaan (67%) senilai Rp167.500.000 dengan mekanisme sebagai berikut:
- PBM IHC menerbitkan sejumlah 584.372 lembar saham baru kepada Perusahaan yang mewakili 2% saham di PBM IHC senilai Rp96.250.000. Sehingga PBM IHC memperoleh sebanyak 59.282 lembar saham RSP milik Perusahaan (38,5%).
- PBM IHC melakukan pembelian sejumlah 43.884 lembar saham RSP milik Perusahaan (28,5%) dengan mekanisme jual beli saham senilai Rp71.250.000.

PBM IHC telah melakukan penyetoran kas kepada Perusahaan pada tanggal 7 Agustus 2020 sejumlah Rp71.250.000.

Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham mengenai perubahan anggaran dasar RSP tanggal 7 Agustus 2020 telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 4 September 2020.

Selisih antara nilai pengalihan dan nilai tercatat aset neto dicatat sebagai selisih nilai transaksi bisnis kombinasi entitas sepengendali sebagai bagian dari akun tambahan modal disetor, dengan perhitungan sebagai berikut:

Aset neto RSP pada tanggal pengalihan	33.114.453
Nilai pengalihan	167.500.000
Selisih nilai transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali	**(134.385.547)**

d. Berdasarkan akta jual beli saham tanggal 9 Oktober 2020, Perusahaan mengakuisisi kepemilikan saham PT Multimedia Nusantara pada ILCS sebanyak 4.900.000 lembar saham atau setara dengan 49% porsi kepemilikan saham ILCS dengan nilai pengalihan sebesar Rp49.200.000.

33. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL (continued)

c. Based on Decision-Shares Conditional Agreement on June 30, 2020, PBM IHC takeover 103,166 RSP shares owned by the Company (67%) worth Rp167,500,000 by using the following mechanism:

- *PBM IHC issued 584,372 new shares to the Company which represent 2% of the shares of PBM IHC amounting to Rp96,250,000. Therefore, PBM IHC acquired 59,282 RSP shares of the Company (38.5%).*
- *PBM IHC purchased a total of 43,884 RSP shares owned by the Company (28.5%) with a share sale and purchase mechanism worth Rp71,250,000.*

PBM IHC have transferred cash to the Company amounted Rp71,250,000 on August 7, 2020 to the Company.

The Deed of Shareholder Decree Statement regarding the amendment to the RSP's articles of association dated August 7, 2020 has been notified to and received by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia on September 4, 2020.

Difference between transfer prices and the carrying value of net assets is recorded as difference arising from business combination of entites under common control as part of paid in capital account is as follows:

Net assets of RSP as of transfer date	33.114.453
Transfer amount	167.500.000
Difference arising from business combination of entites under common control	**(134.385.547)**

d. Based on share sales purchase agreement dated October 9, 2020, the Company acquired the share ownership of PT Multimedia Nusantara in ILCS of 4,900,000 shares or equivalent to 49% of the share ownership of ILCS with transfer value of Rp49,200,000.

33. TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan)

Selisih antara nilai pengalihan dan nilai tercatat aset neto dicatat sebagai selisih nilai transaksi bisnis kombinasi entitas sepengendali sebagai bagian dari akun tambahan modal disetor, dengan perhitungan sebagai berikut:

Aset neto ILCS pada tanggal pengalihan	27.407.221
Nilai pengalihan	49.200.000
Selisih nilai transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali	**(21.792.779)**

e. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat MMI No. 54 tanggal 16 April 2021, SPSL mengakuisisi kepemilikan saham PT PP Properti Tbk pada MMI sebanyak 656.250.000 lembar saham atau setara dengan 21,13% porsi kepemilikan saham MMI dengan nilai pengalihan sebesar Rp70.087.500.

Selisih antara nilai pengalihan dan nilai tercatat aset neto dicatat sebagai selisih nilai transaksi bisnis kombinasi entitas sepengendali sebagai bagian dari akun tambahan modal disetor, dengan perhitungan sebagai berikut:

Aset neto MMI pada tanggal pengalihan	61.521.887
Nilai pengalihan	70.087.500
Selisih nilai transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali	**(8.565.613)**

f. Tambahan modal disetor APBS merupakan selisih antara nilai nominal saham dengan setoran modal saham yang diterima dari Van Oord Dredging and Marine Contractor, BV masing-masing sebesar Rp33.152.625 pada tanggal 31 Desember 2022.

g. Tambahan modal disetor PMS merupakan selisih antara nilai nominal saham milik APBS yang dibeli oleh PMS dari Van Oord Dredging and Marine Contractor, BV dan PT Gerbang Samudra Utama dengan setoran modal saham sebesar Rp34.886.436.

h. Tambahan modal disetor TPS sebesar Rp514.813.986 merupakan selisih antara nilai nominal saham milik TPS yang dibeli oleh Perusahaan dari P&O Dover (Holdings) Limited dengan setoran modal saham.

33. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL (continued)

Difference between transfer prices and the carrying value of net assets is recorded as difference arising from business combination of entites under common control as part of paid in capital account is as follows:

Net assets of ILCS as of transfer date	
Transfer amount	
Difference arising from business combination of entites under common control	

e. Based on the Decision of the Meeting Deed of MMI No. 54 dated April 16, 2021, SPSL acquired the share ownership of PT PP Properti Tbk in MMI of 656,250,000 shares or equivalent to 21.13% of the share ownership of MMI with transfer value of Rp70,087,500.

Difference between transfer prices and the carrying value of net assets is recorded as difference arising from business combination of entites under common control as part of paid in capital account is as follows:

Net assets of MMI as of transfer date	
Transfer amount	
Difference arising from business combination of entites under common control	

f. Paid in capital of APBS represents the difference between the par value and the capital contribution received from Van Oord Dredging and Marine Contractor, BV amounting to Rp33,152,625 as of December 31, 2022.

g. Paid in capital of PMS represents the difference between the par value owned by APBS which was purchased by PMS from Van Oord Dredging and Marine Contractor, BV and PT Gerbang Samudra Utama with the capital contribution received amounting Rp34.886.436.

h. Paid in capital of TPS amounting to Rp514,813,986 represents the difference between the par value owned by TPS which was purchased by the Company from P&O Dover (Holdings) Limited with the capital contribution received.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

33. TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan)

i. Tambahan modal disetor PHC merupakan selisih antara nilai nominal saham milik PHC yang dibeli oleh PBM IHC dari Perusahaan dengan setoran modal saham Rp239.860.000 pada tanggal 31 Desember 2020.

j. Tambahan modal disetor PTP1 merupakan selisih antara nilai buku investasi PTP1 pada tanggal pengalihan dengan nilai pembelian saham yang dibeli oleh SPTP.

Aset neto PTP1 pada tanggal pengalihan	302.382.814	*Net assets of PTP1 as of transfer date*
Nilai pengalihan	375.908.500	*Transfer amount*
Selisih nilai transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali	**(73.525.686)**	***Difference arising from business combination of entites under common control***

k. Tambahan modal disetor PMT merupakan selisih yang timbul perubahan nilai buku investasi setelah penerbitan saham baru dicatat sebagai tambahan modal disetor berdasarkan keputusan RUPS Sirkuler PMT tanggal 24 Oktober 2022 (Catatan 1d).

l. Tambahan modal disetor yang berasal dari pengalihan barang milik negara merupakan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (“PP”) No. 10 Tahun 2019 tanggal 22 Februari 2019 sebesar Rp527.133.217 yang berasal dari pengalihan Barang Milik Negara pada Kementerian Perhubungan yang pengadaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 dan 2011.

33. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL (continued)

i. Paid in capital of PHC represents the difference between the par value owned by PHC which was purchased by the PBM IHC from the Company with the capital contribution received amounting to Rp239,860,000 as of December 31, 2020.

j. paid-in capital of PTP1 represents the difference between the book value of PTP1's investment and the purchase value of shares purchased by SPTP.

k. Paid-in capital of PMT represents the difference arising from the change in book value of investment after the issuance of new shares is recorded as additional paid-in capital based on the resolution of PMT's Circular GMS dated October 24, 2022, PMT's shareholders (Note 1d)

l. Additional paid-in capital arise from transfer of government’s assets represents additional capital investment from the Republic of Indonesia which stipulated through Government Regulation (“PP”) No. 10 Year 2019 dated February 22, 2019 amounting to Rp527,133,217 resulting from the transfer of Government’s Assets under the Ministry of Transportation which provided from the Indonesian State Budget Year 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 and 2011.

34. SELISIH NILAI TRANSAKSI DENGAN PIHAK NONPENGENDALI

34. DIFFERENCE IN VALUE OF TRANSACTIONS WITH NON-CONTROLLING INTEREST

Rincian selisih nilai transaksi dengan pihak nonpengendali adalah sebagai berikut:

The details of difference in value of transactions with non-controlling interest are as follows:

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	**31 Desember 2024/ *December 31, 2024***	
Penawaran saham perdana IKT	565.027.539	565.027.539	*Initial public offering of IKT*
Penawaran saham perdana JAI	271.045.395	271.045.395	*Initial public offering of JAI*
Peningkatan kepemilikan saham TCU	832.137	832.137	*Increase in share ownership of TCU*
Total	**836.905.071**	**836.905.071**	***Total***

Penurunan kepemilikan saham Perusahaan sehubungan dengan penawaran saham perdana di IKT dan JAI tidak disertai dengan hilangnya pengendalian.

The decrease in company ownership in connection with the initial public offerings in IKT and JAI which is not accompanied by loss of control.

35. DIVIDEN DAN CADANGAN UMUM

35. DIVIDEND AND GENERAL RESERVE

Berikut merupakan rincian pembagian dividen dan pembentukan cadangan umum pada tahun 2025:

The following represents details of dividend distribution and general reserve in 2025:

Perusahaan/ *The Company*	**Rapat Umum Pemegang Saham/*General Meeting of Shareholders***	**Pembagian Dividen/*Dividend Distribution***	**Cadangan Umum/*General Reserve***	**Tanggal Pembayaran Dividen/ *Date of Dividend Payment***
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia	Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana tertuang dalam Berita Acara RUPS PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No.21 tanggal 24 Juni 2025 */General Meeting of Shareholders (GMS) as outlined in the Minutes of the GMS of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. 21 dated June 24, 2025*	47,46% dari laba neto atau Rp1.700.765.881/ *47.46% of net income or amounted to Rp1,700,765,881*	52,54% dari laba neto atau sebesar Rp1.883.065.066/ *52,54% of net income or amounted to Rp1,883,065,066*	30 Juni 2025 dan 5 Desember 2025/ *June 30, 2025 and December 5, 2025*

Berikut merupakan rincian pembagian dividen dan pembentukan cadangan umum pada tahun 2024:

The following represents details of dividend distribution and general reserve in 2024:

Perusahaan/ *The Company*	**Rapat Umum Pemegang Saham/*General Meeting of Shareholders***	**Pembagian Dividen/*Dividend Distribution***	**Cadangan Umum/*General Reserve***	**Tanggal Pembayaran Dividen/ *Date of Dividend Payment***
Perusahaan (dahulu Pelindo I,II,III,IV) *(formerly Pelindo I,II,III,IV)*	Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana tertuang dalam Berita Acara RUPS PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No.02 tanggal 4 Juni 2024/*General Meeting of Shareholders (GMS) as outlined in the Minutes of the GMS of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. 02 dated June 4, 2024*	27,17% dari laba neto atau Rp1.038.470.000/ *27.17% of net income or amounted to Rp1,038,470,000*	72,83% dari laba neto atau sebesar Rp2.783.652.283/ *72.83% of net income or amounted to Rp2,783,652,283*	2 Juli 2024/ *July 2, 2024*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

36. PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

36. OTHER COMPREHENSIVE INCOME

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi			***Item that wil not be reclassified to profit or loss***
Pengukuran kembali program imbalan pasti - neto	(2.307.888.506)	(617.301.815)	*Remeasurement of defined benefit plans - net*
Perubahan nilai wajar aset keuangan pada nilai wajar melalui rugi komprehensif lain	84.115.577	(131.876.305)	*Change in fair value of financial assets at fair value through other comprehensive loss*
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi			***Item that will be reclassified to profit or loss***
Bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas	(1.802.532.592)	(1.618.497.475)	*Effective portion of gains and losses on hedging instrument in cash flow hedges*
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	569.013.201	575.627.264	*Exchange difference due to financial statements translation*
Total	**(3.457.292.320)**	**(1.792.048.331)**	***Total***

Selisih kurs penjabaran laporan keuangan terutama merupakan penjabaran laporan keuangan JICT, NPCT1, BNCT dan TPK Koja yang mata uang fungsionalnya adalah Dolar Amerika Serikat.

Exchange difference due to financial statements translation mainly represents translation of financial statements of JICT, NPCT1, BNCT and TPK Koja which functional currency is United States Dollar.

37. KEPENTINGAN NONPENGENDALI

37. NON-CONTROLLING INTERESTS

Rincian kepentingan non-pengendali atas ekuitas entitas anak yang dikondolidasi adalah sebagai berikut:

Details of non-controlling interests in equity of consolidated subsidiaries are as follows:

	Aset Neto/*Net Assets*		Laba (Rugi) Neto/ *Net Income (Loss)*		
	31 Desember/ *December 31,*	31 Desember/ *December 31,*	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2025	2024	2025	2024	
BJTI	625.799.768	561.766.723	67.171.264	48.600.136	*BJTI*
IKT	305.635.956	414.259.104	57.612.757	60.980.906	*IKT*
JAI	166.181.639	232.997.259	24.141.056	39.360.367	*JAI*
PMS	94.631.058	171.931.974	9.362.325	23.793.790	*PMS*
Lain-lain	272.951.693	708.814.097	43.688.441	46.571.199	*Others*
Total	**1.465.200.114**	**2.089.769.157**	**201.975.843**	**219.306.398**	***Total***

38. PENDAPATAN OPERASI / *38. OPERATING REVENUES*

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Pelayanan terminal petikemas	14.338.248.507	13.190.291.096	*Container services*
Pelayanan jasa kapal	7.064.995.990	6.385.301.595	*Vessel services*
Pengusahaan tanah, bangunan, air dan listrik	5.187.758.180	4.889.803.829	*Land, building, water and electricity services*
Pendapatan barang non-petikemas	4.896.916.069	4.823.004.590	*Non-container services*
Kerja sama dan *fee for services*	1.208.780.372	965.616.264	*Partnership and fee for services*
Pendapatan konsolidasi dan distribusi barang	693.699.099	561.816.501	*Goods consolidation and distribution services*
Pengusahaan peralatan	653.079.229	434.671.387	*Equipment services*
Pendapatan pas pelabuhan dan terminal	574.170.483	461.451.471	*Port and terminal entry fee*
Pengusahaan tol	225.970.691	197.657.163	*Toll services*
Jasa maritim dan pengerukan	216.476.077	162.747.925	*Marine and dredging services*
Jasa logistik	153.709.761	159.471.070	*Logistic services*
Pendapatan pasar modal dan pasar uang	94.311.541	88.375.707	*Capital market and money market income*
Pelayanan jaringan dan konsultasi sistem informasi	46.562.189	100.396.739	*Network services and consultant of information system*
Pelayanan kesehatan	26.761.529	29.860.028	*Medical services*
Lain-lain	102.026.718	76.187.951	*Others*
Subtotal	**35.483.466.435**	**32.526.653.316**	***Subtotal***
Pendapatan konstruksi	1.244.807.617	2.307.215.142	*Construction revenues*
Total	**36.728.274.052**	**34.833.868.458**	***Total***

Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, tidak ada transaksi dari satu pelanggan dengan total penjualan kumulatif yang melebihi 10% dari total pendapatan konsolidasian.

During the year ended as of December 31, 2025 and 2024, there were no sales made from any single customer with a cumulative amount exceeding 10% of the total consolidated revenue.

Pendapatan konstruksi merupakan jasa kompensasi yang diakui oleh Perusahaan dalam pembangunan terminal Kalibaru, Kijing, Manyar Gresik, Belawan Fase II, Makassar New Port, dan Jalan Tol Cibitung - Cilincing sesuai dengan ISAK 112 “Perjanjian Konsesi Jasa” (Catatan 48a). Pendapatan konstruksi dinilai dengan menggunakan metode *cost-plus,* dimana seluruh biaya dapat diatribusikan langsung sebagai nilai perolehan aset dengan margin tertentu.

Construction revenue is the compensation of the service recognized by the Company for construction of Kalibaru, Kijing, Manyar Gresik, Belawan Phase II, Makassar New Port, and Cibitung - Cilincing Toll Road in accordance with ISAK 112 “Service Concession Arrangement" (Notes 48a). Construction revenue is measured using cost-plus method, where all costs directly attributable to the acquiring cost of the assets with certain margin.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

39. BEBAN OPERASI / *39. OPERATING EXPENSES*

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Kerja sama mitra usaha	7.933.198.625	7.732.099.897	*Partnership*
Pegawai	6.465.116.046	6.360.102.589	*Employee*
Umum	3.813.299.390	3.907.079.457	*General*
Penyusutan dan amortisasi	3.722.550.773	3.776.234.815	*Depreciation and amortization*
Bahan bakar dan bahan habis pakai	3.240.952.539	2.575.421.577	*Fuels and supplies*
Pemeliharaan	1.528.044.957	1.257.974.673	*Maintenance*
Asuransi	511.787.934	395.102.234	*Insurance*
Administrasi kantor	132.443.714	118.501.850	*Office administration*
Subtotal	**27.347.393.978**	**26.122.517.092**	***Subtotal***
Beban konstruksi	1.241.429.641	2.233.984.182	*Construction expenses*
Total	**28.588.823.619**	**28.356.501.274**	***Total***

Kerja sama mitra usaha terutama merupakan beban pembagian pendapatan yang timbul dari perjanjian dengan mitra terseleksi seperti perusahaan-perusahaan operator fasilitas pelabuhan yang menyediakan kegiatan pelayanan jasa bongkar muat, pemindahan lapangan penumpukan, dan *lift on* dan *lift off* di pelabuhan.

The partnership expenses mainly represent the revenue sharing costs arising from the agreements with selected partners such as port facilities' management companies for providing loading and unloading activities, cargodoring, and lift-on and lift-off facilities at the ports.

Beban umum terutama merupakan beban jasa konsultan, penyisihan penurunan nilai piutang, kontribusi kepada pihak lain, imbalan kerja, perjalanan dinas, pendidikan, pelatihan dan pemasaran.

General expenses mainly consist of consultants, allowance for impairment of receivables, contribution to the other parties, employee benefits, business travelling, education, training and marketing expenses.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, tidak ada transaksi dari satu pemasok dengan total pembelian kumulatif yang melebihi 10% dari total pendapatan konsolidasian.

For the year ended as of December 31, 2025 and 2024, there were no purchase made from any single supplier with a cumulative amount exceeding 10% of the total consolidated revenue.

40. PENDAPATAN (BEBAN) OPERASI LAINNYA - NETO / *40. OTHER OPERATING INCOME (EXPENSE) - NET*

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Amortisasi premium (Catatan 49a, 49b, dan 49e)	162.947.086	177.319.344	*Amortization of premium (Notes 49a, 49b, and 49e)*
Pendapatan denda	103.909.589	49.749.052	*Income from penalties*
Penerimaan aset *build, operate*, dan transfer	47.238.643	108.430.009	*Received of build, operate, and transfer assets*
Pemulihan provisi konsesi	11.764.806	180.690.271	*Recovery of concession provision*
Penurunan nilai aset takberwujud - hak konsesi (Catatan 16)	(332.386.976)	-	*Impairment of intangible assets - concession rights (Note 16)*
Rugi selisih kurs - neto	(217.179.453)	(341.011.750)	*Gain (loss) on foreign exchange - net*
Beban denda pajak	(198.934.040)	(297.735.447)	*Tax penalties*
Penurunan nilai investasi asosiasi (Catatan 12a)	(92.992.278)	-	*Impairment of investment in associate (Note 12a)*
Penyisihan uang titipan perkara (Note 50e)	(70.000.000)	-	*Provision for litigation deposit (Note 50e)*
Penurunan nilai aset pengerukan alur (Note 14)	(67.997.152)	-	*Impairment of dredging channel assets (Note 14)*
Lain-lain - neto	(27.313.669)	(68.050.085)	*Others - net*
Total	**(680.943.444)**	**(190.608.606)**	***Total***

41. PENDAPATAN KEUANGAN / *41. FINANCE INCOME*

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Pendapatan bunga deposito	741.280.217	682.785.656	*Interest income from deposits*
Pendapatan jasa giro	158.955.682	155.332.963	*Interest income on current account*
Pendapatan bunga pinjaman	28.564	762.610	*Interest income from loan*
Total	**900.264.463**	**838.881.229**	***Total***

42. BEBAN KEUANGAN / *42. FINANCE COSTS*

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Beban bunga pinjaman bank	2.082.287.846	1.254.675.561	*Interest expenses from bank loans*
Beban bunga, amortisasi diskonto dan biaya transaksi	708.303.970	1.595.812.355	*Interest expenses, amortization of discount and transaction cost*
Beban bunga provisi konsesi	83.357.030	82.388.133	*Provision interest expenses*
Beban bunga sewa	63.641.831	53.787.606	*Lease intersest expenses*
Beban administrasi bank	26.369.930	16.559.852	*bank adinistration expenses*
Beban lain-lain	2.775.953	1.464.215	*Other expenses*
Total	**2.966.736.560**	**3.004.687.722**	***Total***

43. BAGIAN LABA ENTITAS ASOSIASI

43. EQUITY IN INCOME OF ASSOCIATES

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2025	**2024**	
BKMS	307.923.409	218.449.664	*BKMS*
JICT	96.955.848	144.863.008	*JICT*
Ambapers	16.736.445	16.095.508	*Ambapers*
PTI	9.304.022	11.371.390	*PTI*
PHC	4.202.819	4.112.137	*PHC*
TNU	3.703.921	7.236.932	*TNU*
PCN	243.695	78.249	*PCN*
LNG	(1.055.167)	922.623	*LNG*
RSP	(2.110.819)	2.124.150	*RSP*
JBT	(2.840.981)	(88.288)	*JBT*
NPCT1	-	139.753.623	*NPCT1*
BNCT	-	(4.363.877)	*BNCT*
Total	**433.063.192**	**540.555.119**	***Total***

44. SALDO, SIFAT HUBUNGAN DAN JENIS TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usaha normal, Grup melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Entitas dianggap berelasi jika entitas tersebut, antara lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mengendalikan atau mengendalikan bersama, atau memiliki pengaruh signifikan atas Grup dalam pengambilan keputusan keuangan dan operasional. Entitas juga dianggap berelasi jika entitas tersebut sepengendalian dengan Grup.

Pemerintah Republik Indonesia adalah pemegang saham Perusahaan. Seluruh entitas yang dimiliki dan dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia serta entitas dimana Pemerintah Republik Indonesia memiliki pengaruh signifikan merupakan pihak berelasi.

Sifat Hubungan Berelasi

Ringkasan sifat hubungan dan transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

44. BALANCE, NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES

In the normal course of business, the Group enters into transactions with related parties. Entities are considered to be related if, among these, the Company has the ability, directly or indirectly, to control or jointly control or have significant influence over these entities in making financial and operating decisions. Entities are also considered to be related if they are under common control with the Group.

The Government of the Republic of Indonesia is the controlling shareholder of the Company. All entities that are owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia and also entities where the Republic of Indonesia has significant influence are related parties.

Nature of Relationship with Related Parties

Summary of the nature of the relationship and significant transactions with related parties is as follows:

Hubungan/*Relationship*	***Pihak berelasi/ Related parties***
a) Pemegang saham/*Shareholder*	Negara Republik Indonesia
b) Entitas berelasi dengan Pemerintah/ *Government-related entity*	PT Danantara Asset Management PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

44. SALDO, SIFAT HUBUNGAN DAN JENIS TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

Sifat Hubungan Berelasi (lanjutan)

Ringkasan sifat hubungan dan transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

44. BALANCE, NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES (continued)

Nature of Relationship with Related Parties (continued)

Summary of the nature of the relationship and significant transactions with related parties is as follows: (continued)

Hubungan/*Relationship*	***Pihak berelasi/ Related parties***
b) Entitas berelasi dengan Pemerintah (lanjutan)/ *Government-related entity (continued)*	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk PT Bank Syariah Indonesia Tbk PT Bank Raya Indonesia Tbk PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) PT Pertamina Port and Logistics PT Solusi Bangun Andalas PT Solusi Bangun Indonesia Tbk BPJS Kesehatan BPJS Ketenagakerjaan PT Semen Tonasa PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk PT BRI Danareksa Sekuritas PT Pertamina Patra Niaga PT Waskita Karya (Persero) Tbk PT Industri Sandang Nusantara (Persero) PT Asuransi Kredit Indonesia PT Adhi Guna Putera PT Industri Nabati Lestari PT Adhi Karya (Persero) Tbk PT PLN Indonesia Power PT PLN Nusantara Power PT BNI Life Insurance PT Jasa Marga Tollroad Maintenance PT Telekomunikasi Selular PT Pupuk Indonesia Logistik PT Semen Baturaja Tbk PT Semen Padang Koperasi Pegawai PT Pelindo III PT PLN Energi Gas PT Perikanan Nusantara (Persero) PT Aneka Tambang Tbk PT BGR Logistik Indonesia PT Freeport Indonesia PT Pelayaran Bahtera Adhiguna PT Semen Indonesia (Persero) Tbk PT Taspen (Persero) Lembaga National Single Window PT Asuransi Jasaraharja Putra PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) PT Djakarta Lloyd (Persero) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) PT Dharma Lautan Nusantara PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) PT Pertamina Gas PT Pertamina Marine Engineering

44. SALDO, SIFAT HUBUNGAN DAN JENIS TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

Sifat Hubungan Berelasi (lanjutan)

Ringkasan sifat hubungan dan transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

44. BALANCE, NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES (continued)

Nature of Relationship with Related Parties (continued)

Summary of the nature of the relationship and significant transactions with related parties is as follows: (continued)

Hubungan/*Relationship*	***Pihak berelasi/ Related parties***
b) Entitas berelasi dengan Pemerintah (lanjutan)/ *Government-related entity (continued)*	Konsorsium PP - Waskita PT Borneo Alumina Indonesia PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore PT Bukit Prima Bahari PT Sarana Bandar Nasional PT Kereta Api Indonesia (Persero) PT Belawan New Container Terminal (BNCT) PT Portek Indonesia PT Pengembang Listrik Nasional Energi Gas PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) PT Asuransi Jasa Indonesia PT Berdikari (Persero) PT Terminal Nilam Utara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan PT Danareksa (Persero) PT Waskita Beton Precast Tbk PT Pupuk Sriwidjaya Palembang PT Pertamina Trans Kontinental PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero) PT Surveyor Indonesia (Persero) Tbk PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) PT Industri Kereta Api (Persero) PT Jembatan Nusantara PT Rekayasa Industri PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara Perusahaan Umum BULOG PT Pertamina Hulu Energi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) PT Jasa Prima Logistik Dana Pensiun Pelindo Purnakarya ("DP3") Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (“DP4”) Instansi Pemerintah Tentara Nasional Indonesia Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)
c) Entitas asosiasi/*Associate entities*	Jakarta International Container Terminal (JICT) New Priok Container Terminal One (NPCT1) PT Rumah Sakit Pelabuhan (RSP) PT Pelindo Husada Citra (PHC) PT Ambang Barito Nusapersada (Ambapers) PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS) Kerja Sama Operasi Terminal Petikemas Koja (KSO TPK KOJA)

44. SALDO, SIFAT HUBUNGAN DAN JENIS TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

44. BALANCE, NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES (continued)

Transaksi dengan pihak berelasi

Transactions with related parties

Rincian akun signifikan dengan pihak-pihak berelasi (pemerintah, entitas pemerintah atau dinyatakan lain) adalah sebagai berikut:

Details of significant accounts with related parties (government, government - owned entities unless otherwise indicated) are as follows:

a. Kas dan setara kas (Catatan 4)

a. Cash and cash equivalents (Note 4)

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*		31 Desember 2024/ *December 31, 2024*		
	Total/ *Total*	Persentase (%)*/ *Percentage (%)**	Total/ *Total*	Persentase (%)*/ *Percentage (%)**	
Bank					***Cash in banks***
Rupiah					*Rupiah*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.061.409.743	1,64	2.172.471.662	1,70	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.687.562.477	1,34	1.098.285.961	0,86	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	450.182.484	0,36	195.809.715	0,15	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	205.682.438	0,16	89.179.512	0,07	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	177.094.727	0,14	104.335.445	0,08	*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	12.090.985	0,01	51.215.318	0,04	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	139.036	0,00	4.761.285	0,00	*PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara*
Lain-lain	191.480	0,00	2.435	0,00	*Others*
Total	**4.594.353.370**	**3,65**	**3.716.061.333**	**2,90**	***Total***
Dolar AS					*US Dollar*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	246.901.953	0,20	309.422.110	0,24	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	4.802.419	0,00	5.182.406	0,00	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	3.861.627	0,00	3.523.382	0,00	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Raya Indonesia Tbk	-	-	321.870	0,00	*PT Bank Raya Indonesia Tbk*
Total	**255.565.999**	**0,20**	**318.449.768**	**0,24**	***Total***
Deposito Berjangka					***Time Deposits***
Rupiah					*Rupiah*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	4.559.844.429	3,62	3.195.725.800	2,51	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	1.536.500.000	1,22	1.291.503.204	1,01	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1.534.503.745	1,22	2.284.700.000	1,79	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.201.963.494	0,95	63.000.000	0,05	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	429.007.489	0,34	1.272.089.992	1,00	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	231.500.000	0,18	445.000.000	0,35	*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk*
PT Bank Raya Indonesia Tbk	66.400.000	0,05	13.119.000	0,01	*PT Bank Raya Indonesia Tbk*
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara	4.000.000	0,00	301.250.000	0,24	*PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	-	-	400.000.000	0,31	*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk*
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	-	-	14.600.000	0,01	*PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara*
Total	**9.563.719.157**	**7,58**	**9.280.987.996**	**7,28**	***Total***
Dolar AS					*US Dollar*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	875.132.096	0,69	1.252.314.572	0,98	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	-	4.860.721.500	3,81	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	-	-	326.149.160	0,26	*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	-	-	85.593.879	0,07	*PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	-	87.955.440	0,07	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
Total	**875.132.096**	**0,69**	**6.612.734.551**	**5,19**	***Total***

) dari total aset** / *) from total assets***

44. SALDO, SIFAT HUBUNGAN DAN JENIS TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

44. BALANCE, NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES (continued)

Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Transactions with related parties (continued)

Rincian akun signifikan dengan pihak-pihak berelasi (pemerintah, entitas pemerintah atau dinyatakan lain) adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Details of significant accounts with related parties (government, government - owned entities unless otherwise indicated) are as follows: (continued)

b. Investasi jangka pendek (Catatan 5)

b. Short-term investment (Note 5)

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*		31 Desember 2024/ *December 31, 2024*		
	Total/ *Total*	**Persentase (%)*/ *Percentage (%)****	**Total/ *Total***	**Persentase (%)*/ *Percentage (%)****	
Deposito berjangka					***Time deposits***
Rupiah					*Rupiah*
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara	50.000.000	0,04	-	-	*PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	20.000.000	0,02	2.700.000	0,00	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	-	-	50.000.000	0,04	*PT Bank Tabungan Negara Persero (Tbk)*
Dolar AS					*US Dollar*
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	-	-	323.240.000	0,25	*PT Bank Rakyat Indonesia Tbk*
Total	**70.000.000**	**0,06**	**375.940.000**	**0,29**	***Total***

) dari total aset** — ***) from total assets

c. Piutang usaha (Catatan 6)

c. Trade receivables (Note 6)

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*		31 Desember 2024/ *December 31, 2024*		
	Total/ *Total*	**Persentase (%)*/ *Percentage (%)****	**Total/ *Total***	**Persentase (%)*/ *Percentage (%)****	
Difakturkan					*Billed*
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	118.716.545	0,09	119.598.854	0,09	*PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)*
PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	78.983.361	0,06	82.923.911	0,06	*PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)*
JICT	55.563.827	0,04	13.476.344	0,01	*JICT*
PT Djakarta Lloyd (Persero)	49.232.933	0,04	49.240.226	0,04	*PT Djakarta Lloyd (Persero)*
PT Pertamina Gas	34.308.723	0,03	-	-	*PT Pertamina Gas*
PT Petrokimia Gresik	31.723.908	0,02	32.069.443	0,03	*PT Petrokimia Gresik*
PT Pertamina Trans Kontinental	31.695.852	0,02	13.473.789	0,01	*PT Pertamina Trans Kontinental*
KOJA	29.042.796	0,02	34.788.004	0,03	*KOJA*
PT Aneka Tambang Tbk	27.232.244	0,02	18.988.467	0,01	*PT Aneka Tambang Tbk*
PT Rekayasa Industri	21.101.824	0,02	-	-	*PT Rekayasa Industri*
Tentara Nasional Indonesia	20.190.545	0,02	4.855.055	0,00	*Indonesian Armed Forces*
PT Pertamina Patra Niaga	12.994.458	0,01	24.979.171	0,02	*PT Pertamina Patra Niaga*
PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	11.579.206	0,01	8.478.854	0,01	*PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)*
PT Bahtera Adhiguna	11.054.439	0,01	11.296.576	0,01	*PT Bahtera Adhiguna*
PT Borneo Alumina Indonesia	8.968.584	0,01	-	-	*PT Borneo Alumina Indonesia*
PT Perikanan Nusantara (Persero)	8.147.254	0,01	8.451.173	0,00	*PT Perikanan Nusantara (Persero)*
PT Industri Nabati Lestari	6.027.273	0,00	332.921	0,00	*PT Industri Nabati Lestari*
PT Adhiguna Putera	5.262.117	0,00	2.517.006	0,00	*PT Adhiguna Putera*
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	4.791.144	0,00	1.054.324	0,00	*PT Pupuk Sriwidjaja Palembang*
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	3.807.112	0,00	4.458.394	0,00	*PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)*
PT Semen Tonasa	3.692.151	0,00	8.080.278	0,01	*PT Semen Tonasa*
PT Pupuk Indonesia Logistik	3.015.257	0,00	1.899.200	0,00	*PT Pupuk Indonesia Logistik*
PT PLN Energi Gas	2.936.493	0,00	8.809.480	0,00	*PT PLN Energi Gas*
PT Bukit Prima Bahari	2.309.686	0,00	671.843	0,00	*PT Bukit Prima Bahari*
PT Pertamina Hulu Energi	2.291.128	0,00	5.834.411	0,00	*PT Pertamina Hulu Energi*
PT Belawan New Container Terminal	2.229.047	0,00	19.787.227	0,02	*PT Belawan New Container Terminal*
PT Semen Padang	2.187.003	0,00	2.656.458	0,00	*PT Semen Padang*
PT Portek Indonesia	2.102.620	0,00	2.044.763	0,00	*PT Portek Indonesia*
PT Solusi Bangun Indonesia Tbk	2.012.718	0,00	2.419.188	0,00	*PT Solusi Bangun Indonesia Tbk*

44. SALDO, SIFAT HUBUNGAN DAN JENIS TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

44. BALANCE, NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES (continued)

Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Transactions with related parties (continued)

Rincian akun signifikan dengan pihak-pihak berelasi (pemerintah, entitas pemerintah atau dinyatakan lain) adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Details of significant accounts with related parties (government, government - owned entities unless otherwise indicated) are as follows: (continued)

c. Piutang usaha (Catatan 6) (lanjutan)

c. Trade receivables (Note 6) (continued)

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*		31 Desember 2024/ *December 31, 2024*		
	Total/ *Total*	**Persentase (%)*/ *Percentage (%)****	**Total/ *Total***	**Persentase (%)*/ *Percentage (%)****	
Instansi Pemerintah	1.893.942	0,00	14.977.317	0,01	*Government Institution*
PT Semen Baturaja Tbk	1.787.622	0,00	1.607.532	0,00	*PT Semen Baturaja Tbk*
PT Sarana Bandar Nasional	1.658.845	0,00	1.494.097	0,00	*PT Sarana Bandar Nasional*
PT Jembatan Nusantara	1.651.164	0,00	352.316	0,00	*PT Terminal Nilam Utara*
Lembaga National Single Window	1.508.686	0,00	-	-	*Lembaga National Single Window*
PT Solusi Bangun Andalas	1.470.411	0,00	3.014.937	0,00	*PT Solusi Bangun Andalas*
PT Pertamina (Persero)	1.361.190	0,00	3.951.919	0,00	*PT Pertamina (Persero)*
PT BGR Logistik Indonesia	1.202.286	0,00	8.677.856	0,00	*PT BGR Logistik Indonesia*
PT Industri Kereta Api (Persero)	1.264.469	0,00	154.554	0,00	*PT Industri Kereta Api (Persero)*
PT Pertamina Marine Engineering	1.017.523	0,00	-	-	*PT Pertamina Marine Engineering*
PHC	882.907	0,00	3.946.602	0,00	*PHC*
PT Jasa Prima Logistik	854.399	0,00	8.580.293	0,00	*PT Jasa Prima Logistik*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	588.167	0,00	1.499.127	0,00	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	503.705	0,00	3.666.414	0,00	*PT Semen Indonesia (Persero) Tbk*
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	456.590	0,00	1.149.809	0,00	*PT Wijaya Karya (Persero) Tbk*
PT Pertamina Port and Logistic	124.102	0,00	3.184.148	0,00	*PT Pertamina Port and Logistic*
PT PLN Indonesia Power	-	-	140.077.478	0,11	*PT PLN Indonesia Power*
PT Dharma Lautan Nusantara	-	-	4.638.896	0,00	*PT Dharma Lautan Nusantara*
PT Sinergi Gula Nusantara	-	-	4.221.102	0,00	*PT Sinergi Gula Nusantara*
NPCT1	-	-	3.097.659	0,00	*NPCT1*
Lain-lain	20.895.680	0,02	23.354.188	0,02	*Others*
Sub-total	**632.321.936**	**0,45**	**714.831.604**	**0,49**	*Sub-total*
Belum difakturkan					*Unbilled*
KOJA	6.178.457	0,00	4.296.043	0,00	*KOJA*
JICT	1.328.303	0,00	3.478.900	0,00	*JICT*
PT Pertamina (Persero)	-	0,00	1.097.198	0,00	*PT Pertamina (Persero)*
Kementrian Keuangan	5.057.015	0,00	-	-	*Ministry of Finance*
PT Perkebunan Nusantara	-	0,00	1.628.807	0,00	*PT Perkebunan Nusantara*
PT Pertamina Patra Niaga	81.849.371	0,06	43.170.030	0,03	*PT Pertamina Patra Niaga*
PT Pertamina Trans Kontinental	6.610.168	0,00	204	0,00	*PT Pertamina Trans Kontinental*
PT Belawan New Container Terminal	3.486.193	0,00	1.933.578	0,00	*PT Belawan New Container Terminal*
PT Adhiguna Putra	2.678.555	0,00	-	-	*PT Adhiguna Putra*
PT Pengembang Listrik Nasional Energi GAS	6.249.961	0,00	-	-	*PT Pengembang Listrik Nasional Energi GAS*
NPCT1	21.606.897	0,02	4.710.474	0,00	*NPCT1*
PT Energi Primer Indonesia	18.533.389	0,01	-	-	*PT Energi Primer Indonesia*
PT Bank SMBC Indonesia Tbk	19.770.988	0,02	6.176.417	0,00	*PT Bank SMBC Indonesia Tbk*
PT Bank Syariah Indonesia	202.460	0,00	5.559.290	0,00	*PT Bank Syariah Indonesia*
Lain-lain	4.614.298	0,00	9.933.265	0,00	*Others*
Sub-total	**178.166.055**	**0,12**	**81.984.206**	**0,03**	*Sub-total*
Total	810.487.991	0,56	796.815.810	0,52	*Total*
Dikurangi:					*Less:*
Penyisihan penurunan nilai	(341.551.862)	0,27	(340.995.909)	0,27	*Allowance for impairment*
Neto	**468.936.129**	**0,29**	**455.819.901**	**0,25**	***Net***

) dari total aset** — *) from total assets***

44. SALDO, SIFAT HUBUNGAN DAN JENIS TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

44. BALANCE, NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES (continued)

Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Transactions with related parties (continued)

Rincian akun signifikan dengan pihak-pihak berelasi (pemerintah, entitas pemerintah atau dinyatakan lain) adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Details of significant accounts with related parties (government, government - owned entities unless otherwise indicated) are as follows: (continued)

d. Piutang lain-lain (Catatan 7)

d. Other receivables (Note 7)

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*		31 Desember 2024/ *December 31, 2024*		
	Total/ *Total*	**Persentase (%)*/ *Percentage (%)****	**Total/ *Total***	**Persentase (%)*/ *Percentage (%)****	
BKMS	102.706.824	0,08	107.201.394	0,08	*BKMS*
LMAN	34.643.517	0,03	39.995.082	0,03	*LMAN*
Direktorat Jenderal Pajak	10.193.390	0,01	-	-	*Directorate General of Taxes*
PT Djakarta Lloyd (Persero)	8.617.024	0,01	8.617.024	0,01	*PT Djakarta Lloyd (Persero)*
Lain-lain	3.425.101	0,00	9.045.775	0,01	*Others*
Sub-total	159.585.856	0,13	164.859.275	0,13	*Sub-total*
Dikurangi:					*Less:*
Penyisihan penurunan nilai	(9.951.038)	(0,01)	(9.951.038)	(0,01)	*Allowance for impairment*
Total	**149.634.818**	**0,12**	**154.908.237**	**0,12**	***Total***

) dari total aset** — ***) from total assets

Piutang dari Lembaga Manajemen Aset Negara ("LMAN") merupakan dana talangan yang telah dibayarkan oleh CTP kepada pemilik lahan dan akan diganti oleh LMAN sesuai dengan amendemen Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Cibitung-Cilincing dimana CTP menyediakan dana talangan dengan nilai maksimum sebesar Rp4.560.709.011. Piutang ini digunakan sebagai jaminan atas utang bank (Catatan 26).

Receivables from the State Assets Management Body ("LMAN") represent bailout funds that have been paid by CTP to land owners and will be reimbursed to LMAN in accordance with the Toll Operation Cibitung-Cilincing Toll Road Agreement amendments where CTP provides funding with a maximum of Rp4,560,709,011. These receivables used as collateral for bank loan (Note 26).

Piutang lain-lain BKMS merupakan pinjaman dari BJTI ke BKMS sehubungan dengan pengembangan lahan BKMS.

Other receivables of BKMS are loan from BJTI to BKMS in relation to BKMS's land development.

e. Aset kontrak (Catatan 9)

e. Contract assets (Note 9)

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*		31 Desember 2024/ *December 31, 2024*		
	Total/ *Total*	**Persentase (%)*/ *Percentage (%)****	**Total/ *Total***	**Persentase (%)*/ *Percentage (%)****	
PT PLN Indonesia Power	104.293.547	0,08	108.033.502	0,08	*PT PLN Indonesia Power*
PT Pertamina Patra Niaga	4.474.068	0,00	2.186.536	0,00	*PT Pertamina Patra Niaga*
PT Jakarta International Container Terminal	36.714.882	0,03	22.503.635	0,02	*PT Jakarta International Container Terminal*
BPJS Kesehatan	6.420.628	0,01	4.534.979	0,00	*BPJS Kesehetan*
PT Belawan New Container Terminal	27.584.665	0,02	17.979.046	0,01	*PT Belawan New Container Terminal*
PT Prima Nur Panurjwan	12.797.229	0,01	-	-	*PT Prima Nur Panurjwan*
PT Pertamina Hulu Energi (WMO)	861.800	0,00	1.526.220	0,00	*PT Pertamina Hulu Energi (WMO)*
PT Adhiguna Putra	-	-	2.473.055	0,00	*PT Adhiguna Putra*
PT Pengembang Listrik Nasional Energi GAS	-	-	5.770.461	0,00	*PT Pengembang Listrik Nasional Energi GAS*
PT Rekayasa Industri	-	-	1.956.555	0,00	*PT Rekayasa Industri*
PT PLN Nusantara Power	-	-	2.272.314	0,00	*PT PLN Nusantara Power*
Lainnya	1.527.042	0,00	4.998.523	0,00	*Others*
Total	**194.673.861**	**0,15**	**174.234.826**	**0,11**	***Total***

) dari total aset** — ***) from total assets

44. SALDO, SIFAT HUBUNGAN DAN JENIS TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

44. BALANCE, NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES (continued)

Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Transactions with related parties (continued)

Rincian akun signifikan dengan pihak-pihak berelasi (pemerintah, entitas pemerintah atau dinyatakan lain) adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Details of significant accounts with related parties (government, government - owned entities unless otherwise indicated) are as follows: (continued)

f. Aset lancar lainnya (Catatan 11) / *f. Other current assets (Note 11)*

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*		31 Desember 2024/ *December 31, 2024*		
	Total/ *Total*	**Persentase (%)*/ *Percentage (%)****	**Total/ *Total***	**Persentase (%)*/ *Percentage (%)****	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	979.000.000	0,78	550.969.850	0,43	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	450.370.043	0,36	718.888.028	0,56	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk	-	-	1.461.147	0,00	*PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk*
Total	**1.429.370.043**	**1,14**	**1.271.319.025**	**0,99**	***Total***

) dari total aset** / *) from total assets***

g. Utang usaha (Catatan 20) / *g. Trade payable (Note 20)*

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*		31 Desember 2024/ *December 31, 2024*		
	Total/ *Total*	**Persentase (%)*/ *Percentage (%)****	**Total/ *Total***	**Persentase (%)*/ *Percentage (%)****	
PT Pelindo Husada Citra	28.294.300	0,04	1.999.278	0,00	*PT Pelindo Husada Citra*
DP 3 Dana Pensiun	16.173.431	0,02	2.468.553	0,00	*DP 3 Dana Pensiun*
DP 4	14.598.120	0,02	30.244.238	0,04	*DP 4*
BPJS Ketenagakerjaan	11.711.042	0,02	1.083.586	0,00	*BPJS Ketenagakerjaan*
Koperasi Pegawai Pelindo III	10.158.013	0,01	3.836.101	0,00	*Koperasi Pegawai Pelindo III*
BPJS Kesehatan	8.236.967	0,01	6.892.395	0,01	*BPJS Kesehatan*
PT Danareksa (Persero)	5.128.200	0,00	-	-	*PT Danareksa (Persero)*
PT Surveyor Indonesia (Persero) Tbk	3.467.168	0,00	992.195	0,00	*PT Surveyor Indonesia (Persero) Tbk*
PT Asuransi Kredit Indonesia	3.125.171	0,00	-	-	*PT Asuransi Kredit Indonesia*
PT Jasa Marga Tollroad Maintenance	2.628.848	0,00	15.733.335	0,02	*PT Jasa Marga Tollroad Maintenance*
PT BNI Life Insurance	2.566.394	0,00	2.099.703	0,00	*PT BNI Life Insurance*
PT Jakarta International Container Terminal	2.522.725	0,00	7.704	0,00	*PT Jakarta International Container Terminal*
PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	2.048.116	0,00	642.855	0,00	*PT Asuransi Jiwasraya (Persero)*
PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara	1.488.160	0,00	-	-	*PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara*
Konsorsium PP – Waskita	-	-	15.465.927	0,02	*Konsorsium PP - Waskita*
Lain-lain	16.179.598	0,02	15.099.979	0,02	*Others*
Total	**128.326.253**	**0,14**	**96.565.849**	**0,11**	***Total***

) dari total liabilitas** / *) from total liabilities***

h. Uang muka pelanggan (Catatan 21) / *h. Advances from customer (Note 21)*

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*		31 Desember 2024/ *December 31, 2024*		
	Total/ *Total*	**Persentase (%)*/ *Percentage (%)****	**Total/ *Total***	**Persentase (%)*/ *Percentage (%)****	
PT Pertamina Trans Kontinental	8.275.312	0,01	7.270.802	0,01	*PT Pertamina Trans Kontinental*
BPJS Kesehatan	7.290.944	0,01	14.378.173	0,02	*BPJS Kesehatan*
BPJS Ketenagakerjaan	5.136.838	0,01	4.186.919	0,01	*BPJS Ketenagakerjaan*
PT Pertamina (Persero)	4.867.823	0,01	88.292	0,00	*PT Pertamina (Persero)*
Dana pensiun	3.110.532	0,00	947.203	0,00	*Dana Pensiun*
PT Asuransi Kredit Indonesia	2.810.696	0,00	3.646.418	0,00	*PT Asuransi Kredit Indonesia*
Divisi Aneka Usaha dan Properti	2.449.379	0,00	515.565	0,00	*Divisi Aneka Usaha dan Properti*
PT Asuransi Jasa Indonesia	2.391.271	0,00	5.023.458	0,01	*PT Asuransi Jasa Indonesia*
PT Pertamina Patra Niaga (Persero)	1.138.312	0,00	5.416.832	0,01	*PT Pertamina Patra Niaga (Persero)*
PT Asuransi Jiwasraya	904.886	0,00	7.003.063	0,01	*PT Asuransi Jiwasraya*
PT BNI Life Insurance	476.637	0,00	9.419.556	0,01	*PT BNI Life Insurance*
Lain-lain	13.983.047	0,02	14.465.867	0,02	*Others*
Total	**52.835.677**	**0,06**	**72.362.148**	**0,10**	***Total***

) dari total liabilitas** / *) from total liabilities***

44. SALDO, SIFAT HUBUNGAN DAN JENIS TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Rincian akun signifikan dengan pihak-pihak berelasi (pemerintah, entitas pemerintah atau dinyatakan lain) adalah sebagai berikut: (lanjutan)

i. Uang titipan (Catatan 23)

	31 Desember 2025/ December 31, 2025		31 Desember 2024/ December 31, 2024		
	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*	
Dewan Komisaris dan Direksi	60.952.078	0,08	66.431.201	0,09	Board of Commisioner and Board of Directors
BPJS Ketenagakerjaan	19.571.146	0,03	6.758.110	0,01	BPJS Ketenagakerjaan
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	6.136.112	0,01	-	-	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT BNI Life Insurance	2.532.912	0,00	4.005.111	0,01	PT BNI Life Insurance
Koperasi Pegawai	2.019.741	0,00	5.064.320	0,01	Koperasi Pegawai
PT Pertamina Trans Kontinental	1.443.289	0,00	-	-	PT Pertamina Trans Kontinental
PT Varuna Tirta Prakasya	-	-	2.698.919	0,00	PT Varuna Tirta Prakasya
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	-	-	1.853.167	0,00	PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)
Lain-lain	22.160.469	0,03	22.090.473	0,03	Others
Total	**114.815.747**	**0,15**	**108.901.301**	**0,15**	***Total***

) dari total liabilitas | ****) from total liabilities***

j. Liabilitas jangka pendek lainnya (Catatan 23)

	31 Desember 2025/ December 31, 2025		31 Desember 2024/ December 31, 2024		
	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*	
Lain-Lain					***Others***
BLU Set-BPJT	178.646.002	0,24	178.541.609	0,23	BLU Set-BPJT
PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	31.666.118	0,04	31.666.118	0,04	PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero)
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	29.979.775	0,04	12.023.798	0,02	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	27.848.713	0,04	477.425.709	0,62	PT Waskita Karya (Persero)Tbk
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	-	-	32.221.016	0,04	PT Adhi Karya (Persero) Tbk
PT Waskita Beton Precast Tbk	-	-	12.821.295	0,02	PT Waskita Beton Precast Tbk
PHC	-	-	9.731.936	0,01	PHC
PT BRI Danareksa Sekuritas	-	-	4.376.000	0,01	PT BRI Danareksa Sekuritas
DP3	-	-	3.778.453	0,00	DP3
Industri Sandang Nusantara Persero	-	-	2.375.255	0,00	Industri Sandang Nusantara Persero
Lain-lain	2.708.593	0,00	5.304.916	0,01	Others
Total	**270.849.201**	**0,36**	**770.266.105**	**1,00**	***Total***

) dari total liabilitas | ****) from total liabilities***

Utang kepada Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Badan Layanan Umum Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol ("BLU Set-BPJT") merupakan pinjaman biaya pergantian atas pembelian tanah untuk proyek jalan tol Cibitung-Cilincing.

Liabiltas jangka pendek lainnya - lain-lain kepada PT Adhi Karya (Persero) Tbk merupakan akrual retensi atas pekerjaan pembangunan Dermaga PTFI dan fasilitas pendukungnya di Terminal Manyar Pelabuhan Gresik PT Berlian Manyar Sejahtera.

44. BALANCE, NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES (continued)

Transactions with related parties (continued)

Details of significant accounts with related parties (government, government - owned entities unless otherwise indicated) are as follows: (continued)

i. Deposits (Note 23)

Payable to the Ministry of Public Works and Public Housing - Badan Layanan Umum Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol ("BLU Set-BPJT") represents a loan for replacement costs for the purchase of land for the Cibitung-Cilincing toll road project.

Other current liabilities - others to PT Adhi Karya (Persero) Tbk represents the retention accrual for development projects of Jetty PTFI and its supporting facilities at Manyar Terminal Gresik Port PT Berlian Manyar Sejahtera.

44. SALDO, SIFAT HUBUNGAN DAN JENIS TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

44. BALANCE, NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTION WITH RELATED PARTIES (continued)

Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Transactions with related parties (continued)

j. Liabilitas jangka pendek lainnya (Catatan 23) (lanjutan)

j. Other current liabilities (Note 23) (continued)

Liabilitas jangka pendek lainnya kepada PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) merupakan kekurangan pembayaran kompensasi atas pemindahan dan pengosongan Galangan III DKB ke Pulau Batam berdasarkan Surat Perjanjian No.HK.566/27/11/PI.II-11 dan No. 024/ Kontr/I/DKB/2011 tanggal 15 Agustus 2011.

Other current liabilites to PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) represents a shortage of payment of compensation to DKB for the removal and emptying of Galangan III in Batam Island based on Letter Agreement No. HK.566/27/11/PI.II-11 and No. 024/Kontr/I/DKB/2011 dated August 15, 2011.

Liabilitas jangka pendek lainnya kepada PT Pelindo Husada Cipta ("PHC") merupakan pembayaran *management fee* pelayanan kesehatan kepada PHC atas pelayanan kesehatan pegawai.

Other current liabilites to PT Pelindo Husada Cipta ("PHC") represents payment of health service management fees to PHC for employee health services.

k. Utang Lembaga Keuangan Non-Bank (Catatan 27)

k. Loan from non-bank financial institution (Note 27)

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*		31 Desember 2024/ *December 31, 2024*		
	Total/ *Total*	Persentase (%)*/ *Percentage (%)**	Total/ *Total*	Persentase (%)*/ *Percentage (%)**	
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	-	-	**1.502.045.095**	**1,94**	*PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)*

) dari total liabilitas** / *) from total liabilities***

l. Liabilitas jangka panjang lainnya (Catatan 29)

l. Other long-term liabilities (Note 29)

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*		31 Desember 2024/ *December 31, 2024*		
	Total/ *Total*	Persentase (%)*/ *Percentage (%)**	Total/ *Total*	Persentase (%)*/ *Percentage (%)**	
PT PLN	-	-	3.458.284	0,00	*PT PLN*
KSOP	-	-	8.033.510	0,01	*KSOP*
Lain-lain	23.965	0,00	7.230.234	0,01	*Others*
Total	**23.965**	**0,00**	**18.722.028**	**0,02**	***Total***

) dari total liabilitas** / *) from total liabilities***

Liabilitas jangka panjang lainnya kepada KSOP merupakan provisi reinvestasi aset konsesi oleh BMS.

Other long-term liabilities to KSOP represents provision for concession assets reinvestment by BMS.

m. Remunerasi personil manajemen kunci

m. Key management personnel remuneration

Total gaji dan imbalan kerja jangka pendek lainnya yang dibayar atau diakru untuk Dewan Komisaris dan Direksi Grup adalah sebesar Rp771.570.161 dan Rp726.121.037 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Total salaries and other short-term benefits paid to or accrued for the Group's Boards of Commissioners and Directors amounted to Rp771,570,161 and Rp726,121,037, for the year ended December 31, 2025 and 2024.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

45. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

45. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES

		31 Desember 2025/*December 31, 2025*		
		Dalam mata uang asing (nilai penuh)/ *In foreign currencies (full amount)*	**Setara dalam Rupiah/ *Equivalent in Rupiah***	
Aset				***Assets***
Kas dan setara kas	USD	67.498.367	1.132.757.591	*Cash and cash equivalents*
Investasi jangka pendek	USD	858.078	14.400.270	*Short-term investments*
Piutang usaha	USD	3.598.056	60.382.571	*Trade receivables*
Total aset			**1.207.540.432**	***Total assets***
Liabilitas				***Liabilities***
Utang usaha	USD	10.297	172.806	*Trade payables*
Utang usaha	AUD	33.268	374.429	*Trade payables*
Utang obligasi	USD	465.000.000	7.803.630.400	*Bonds payables*
Utang bank jangka panjang	USD	1.528.100.000	25.644.574.200	*Long-term bank loan*
Liabilitas jangka panjang lainnya	USD	16.186.882	271.648.254	*Other long-term liabilities*
Total liabilitas			**33.720.399.689**	***Total liabilities***
Liabilitas neto			**32.512.859.257**	***Net liabilities***

		31 Desember 2024/*December 31, 2024*		
		Dalam mata uang asing (nilai penuh)/ *In foreign currencies (full amount)*	**Setara dalam Rupiah/ *Equivalent in Rupiah***	
Aset				***Assets***
Kas dan setara kas	USD	428.980.269	6.933.179.111	*Cash and cash equivalents*
Investasi jangka pendek	USD	20.000.000	323.240.000	*Short-term investments*
Piutang usaha	USD	3.483.189	56.295.305	*Trade receivables*
Total aset			**7.312.714.416**	***Total assets***
Liabilitas				***Liabilities***
Utang usaha	USD	156.018	2.521.559	*Trade payables*
Utang usaha	AUD	37.142	374.429	*Trade payables*
Utang obligasi	USD	1.501.357.000	24.264.931.834	*Bonds payables*
Utang bank jangka panjang	USD	975.000.000	15.757.950.000	*Long-term bank loan*
Liabilitas jangka panjang lainnya	USD	16.208.136	261.955.899	*Other long-term liabilities*
Total liabilitas			**40.287.733.721**	**ss*Total liabilities***
Liabilitas neto			**32.975.019.305**	***Net liabilities***

Untuk memitigasi risiko akibat selisih aset dan liabilitas valuta asing tersebut, Grup telah melakukan transaksi lindung nilai (Catatan 25 dan 26)

To mitigate the risk arising from the gap between assets and liabilities in foreign currencies, the Group has entered into hedging transactions (Notes 25 and 26).

46. NILAI WAJAR DARI INSTRUMEN KEUANGAN

Tabel berikut menyajikan nilai tercatat, yang juga merefleksikan nilai wajarnya, dari instrumen keuangan Grup:

46. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS

The following table sets out the carrying values, which also reflects the estimated fair values, of the Group's financial instruments:

	31 Desember 2025/ *December 31 , 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
Aset Keuangan			***Financial Assets***
Kas dan setara kas	15.567.392.704	20.352.943.946	*Cash and cash equivalents*
Investasi jangka pendek	264.233.122	375.942.057	*Short-term investments*
Piutang usaha - neto	1.930.751.464	2.013.161.922	*Trade receivables - net*
Piutang lain-lain - neto	206.260.223	181.684.666	*Other receivables - net*
Aset kontrak - neto	237.495.521	279.306.945	*Contract assets*
Aset lancar lainnya	1.555.904.807	1.342.811.421	*Other current assets*
Investasi jangka panjang - investasi pada penyertaan saham	420.072.501	371.206.549	*Long-term investment - investment in share of stocks*
Investasi jangka panjang - investasi pada surat utang	546.573.448	591.587.239	*Long-term investment - investment in bonds*
Aset tidak lancar lainnya	1.015.360.445	1.116.042.121	*Other non-current assets*
Total	**21.744.044.235**	**26.624.686.866**	***Total***
Liabilitas Keuangan			***Financial Liabilities***
Utang usaha	932.282.855	862.613.531	*Trade payables*
Beban akrual	9.414.369.377	6.666.411.251	*Accrued expenses*
Liabilitas jangka pendek lainnya	1.141.436.639	1.396.270.306	*Other current liabilities*
Utang bank jangka panjang	38.389.779.489	24.515.744.350	*Long-term bank loan*
Utang obligasi	8.537.945.580	26.695.832.588	*Bonds payable*
Utang lembaga keuangan non-bank	-	2.265.986.994	*Loan from non-bank financial institution*
Liabilitas jangka panjang lainnya	955.431.661	820.081.368	*Other non-current liabilities*
Liabilitas sewa	806.096.025	910.259.530	*Lease liabilities*
Total	**60.177.341.626**	**64.133.199.918**	***Total***

Nilai wajar didefinisikan sebagai jumlah dimana instrumen tersebut dapat dipertukarkan di dalam transaksi jangka pendek antara pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan yang memadai melalui suatu transaksi yang wajar, selain di dalam penjualan terpaksa atau penjualan likuidasi.

Fair value is defined as the amount at which an instrument could be exchanged in a current transaction between knowledgeable willing parties in an arm's length transaction, other than in a forced or liquidation sale.

Instrumen keuangan yang disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dicatat sebesar nilai wajar, atau disajikan dalam jumlah tercatat, baik karena jumlah tersebut mendekati nilai wajarnya atau karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal.

Financial instruments presented in the consolidated statement of financial position are carried at fair value, otherwise, they are presented at carrying amounts as either these are reasonable approximation of fair values or their fair values cannot be reliably measured.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

46. NILAI WAJAR DARI INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

Grup menentukan pengukuran nilai wajar untuk tujuan pengungkapan setiap aset keuangan dan liabilitas keuangan berdasarkan metode dan asumsi sebagai berikut:

- Nilai wajar aset keuangan lancar dan liabilitas keuangan jangka pendek yang mencakup, antara lain, kas dan setara kas, investasi jangka pendek - deposito berjangka, investasi jangka pendek - aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi, piutang usaha, piutang lain-lain, aset kontrak, aset lancar lainnya, utang usaha, beban akrual dan liabilitas jangka pendek lainnya, dianggap mendekati jumlah tercatatnya sebagai hasil dari pendiskontoan yang tidak signifikan.

- Investasi jangka pendek - efek yang diperdagangkan dan investasi jangka panjang - penyertaan saham dinyatakan pada nilai wajarnya dengan menggunakan kuotasi harga pasar. Investasi jangka panjang - surat utang dinyatakan pada nilai wajar dengan referensi harga dari surat berharga yang sejenis pada tanggal pelaporan.

- Nilai wajar aset keuangan tidak lancar lainnya dicatat sebesar biaya historis karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal. Tidak praktis untuk mengestimasi nilai wajar dari aset tersebut karena tidak ada jangka waktu pembayaran yang pasti walaupun tidak diharapkan untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

- Estimasi nilai wajar utang obligasi, liabilitas sewa, utang bank dan liabilitas jangka panjang lainnya ditentukan dengan mendiskontokan arus kas masa depan dengan menggunakan tingkat suku bunga pasar untuk instrumen dengan syarat, risiko kredit dan jatuh tempo yang serupa.

46. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

The Group determined the fair value measurement for disclosure purposes of each financial asset and financial liability based on the following methods and assumptions:

- *The fair value of current financial assets and current financial liabilities which includes, among others, cash and cash equivalents, short-term investments - time deposits, short-term investments - financial assets measured at fair value through profit or losses, trade receivables, other receivables, contract assets, other current asset, trade payables, accrued expenses and other current liabilities, are considered to approximate their carrying amounts as a result of insignificant discounting.*

- *Short-term investments - marketable securities and long-term investments - investment in share of stocks are presented at fair value using market price quotation. Long-term investments - bonds are presented at fair value by reference to similar bond price at reporting date.*

- *The fair values of other non-current financial assets are carried at historical cost because their fair values cannot be reliably measured. It is not practical to estimate the fair values of such assets because there are no fixed repayment terms although these are not expected to be settled within 12 months after the consolidated statement of financial position date.*

- *The estimated fair values of bonds payable, lease liability, bank loans and other long-term liabilities are determined by discounting the future cash flows using market interest rates for instruments with similar terms, credit risk and remaining maturities.*

46. NILAI WAJAR DARI INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, hirarki nilai wajar Grup untuk aset yang nilai wajarnya diungkapkan adalah sebagai berikut:

46. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

As of December 31, 2025 and 2024, fair value hierarchy of the Group for assets which fair value were disclosed are as follows:

	31 Desember 2025/*December 31, 2025*				
	Total/ ***Total***	**Tingkat 1/** ***Level 1***	**Tingkat 2/** ***Level 2***	**Tingkat 3/** ***Level 3***	
Aset yang nilai wajarnya diungkapkan					***Assets for which fair value are disclosed***
Aset tidak lancar					***Non-current Assets***
Properti investasi (Catatan 13)	44.812.554.957	-	44.812.554.957	-	*Investment properties (Note 13)*

	31 Desember 2024/*December 31, 2024*				
	Total/ ***Total***	**Tingkat 1/** ***Level 1***	**Tingkat 2/** ***Level 2***	**Tingkat 3/** ***Level 3***	
Aset yang nilai wajarnya diungkapkan					***Assets for which fair value are disclosed***
Aset tidak lancar					***Non-current Assets***
Properti investasi (Catatan 13)	38.145.236.173	-	38.145.236.173	-	*Investment properties (Note 13)*

Pada tanggal 31 Desember 2025, tidak terdapat pengalihan antara pengukuran nilai wajar Tingkat 1 dan Tingkat 2 dan tidak ada pengalihan dari Tingkat 3 pengukuran nilai wajar.

Tidak terdapat aset dan liabilitas lain yang diukur dan diungkapkan berdasarkan nilai wajar selain yang telah dijelaskan di atas.

As of December 31, 2025, there is no transfer between measurement of fair value of Level 1 and Level 2 and no transfer from Level 3 fair value measurements.

No other assets and liabilities have been measured and disclosed based on fair value other than above explained.

47. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Grup terpengaruh terhadap risiko nilai tukar mata uang asing, risiko suku bunga atas arus kas, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Grup menerapkan manajemen risiko atas risiko-risiko tersebut dengan melakukan evaluasi atas risiko keuangan dan kerangka pengelolaan risiko keuangan yang tepat untuk Grup. Pengelolaan risiko tersebut memberikan keyakinan kepada Grup bahwa aktivitas keuangan dikelola secara pruden sesuai kebijakan dan prosedur yang tepat dan risiko keuangan diidentifikasi, diukur dan dikelola sesuai dengan kebijakan dan *risk appetite*.

Grup menerapkan kebijakan pengelolaan risiko-risiko sebagaimana dirangkum sebagai berikut.

Risiko nilai tukar mata uang asing

Risiko nilai tukar mata uang asing adalah risiko perubahan nilai wajar arus kas di masa datang dari suatu instrumen keuangan yang berfluktuasi sebagai akibat perubahan nilai tukar mata uang asing yang digunakan oleh Grup. Eksposur Grup terhadap fluktuasi nilai tukar terutama berasal dari utang obligasi dan pinjaman dalam mata uang USD.

47. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

The Group is exposed to foreign exchange risk, interest rate risk of cash flow, credit risk and liquidity risk. The Group applies risk management for such risks by evaluating the financial risks and the appropriate financial risk governance framework for the Group. Such risk management provides assurance to the Group that prudent financial activities are managed according to appropriate policies and procedures and financial risks are identified, measured and managed in accordance with policies and risk appetite.

The Group applies policies for managing each of these risks which are described in more details as follows.

Foreign currency risk

Foreign currency risk is a risk that the fair value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate as a result of changes in foreign currency exchange rates used by the Group. Exposure of the Group against exchange rate fluctuations is mainly derived from debt arising from bonds payable and loans denominated in USD.

47. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko nilai tukar mata uang asing (lanjutan)

Eksposur risiko nilai tukar mata uang asing yang ada pada saat ini diungkapkan pada Catatan 44. Berikut ini adalah analisis sensitivitas efek 1% perubahan kurs mata uang asing terhadap laba setelah pajak dengan semua variabel lain dianggap tetap:

	(Kenaikan) penurunan nilai tukar mata uang/ *(Increases) decreases on foreign exchange rates*	Dampak/ *Effect*	
Perubahan kurs mata uang asing 2025	(+)100bps	(325.162.157)	*Fluctuation in the foreign exchange rates 2025*
	(-)100bps	325.162.157	
Perubahan kurs mata uang asing 2024	(+)100bps	(329.750.193)	*Fluctuation in the foreign exchange rates 2024*
	(-)100bps	329.750.193	

Dalam mengelola risiko nilai tukar mata uang asingnya, Grup menggunakan utang obligasi dan pinjaman sebagai lindung nilai dari eksposur risiko mata uang asing dalam pendapatan yang akan diterima di masa yang akan datang.

Risiko suku bunga atas arus kas

Risiko suku bunga atas arus kas merupakan suatu risiko dimana arus kas masa datang suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar. Pinjaman dengan suku bunga mengambang menimbulkan risiko arus kas.

Saat ini, Grup tidak mempunyai kebijakan formal untuk lindung nilai atas risiko suku bunga. Kebijakan yang diambil oleh manajemen dalam mengantisipasi risiko suku bunga yaitu dengan mengevaluasi secara periodik perbandingan suku bunga tetap terhadap suku bunga mengambang sejalan dengan perubahan suku bunga yang relevan di pasar. Manajemen juga melakukan survei di perbankan untuk mendapatkan perkiraan mengenai suku bunga yang relevan.

47. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

Foreign currency risk (continued)

The current exposure to the foreign currency risk is disclosed in Note 44. Sensitivity analysis of a 1% fluctuation in the foreign exchange rates to profit after tax with other variance considered as constant is as follow:

In managing its foreign currency risk, the Group uses bond payables and loans to hedge its exposure to foreign currency risk for revenues to be received in the future.

Cash flows interest rate risk

Cash flows interest rate risk is a risk that the future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. Loans at variable rates are exposed to cash flows risk.

Currently, the Group does not have a formal hedging policy for interest rate exposures. Measures taken by management in anticipation of interest rate risk is to evaluate by periodically comparing fixed rates to floating interest rates in line with relevant changes in interest rates in the market. Management also conducts a survey on banks to obtain an estimate of the relevant interest rates.

47. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

47. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

Risiko suku bunga atas arus kas (lanjutan)

Cash flows interest rate risk (continued)

Tabel berikut menyajikan jumlah tercatat berdasarkan jatuh tempo dari aset dan liabilitas Grup yang terekspos terhadap risiko suku bunga pada tanggal 31 Desember 2025.

The following table presents the carrying amount by maturity of the Group's assets and liabilities exposed to interest rate risk as of December 31, 2025.

	Suku bunga mengambang/ *Floating interest rate*		Suku bunga tetap/ *Fixed interest rate*			
	≤ 1 tahun/ *≤ 1 year*	> 1 tahun/ *> 1 year*	≤ 1 tahun/ *≤ 1 year*	> 1 tahun/ *> 1 year*	Total	
Aset						***Assets***
Kas dan setara kas	4.975.041.451	-	10.592.351.253	-	15.567.392.704	*Cash and cash equivalent*
Investasi jangka pendek	-	-	264.233.122	-	264.233.122	*Short-term investments*
Total aset	**4.975.041.451**	**-**	**10.856.584.375**	**-**	**15.831.625.826**	***Total assets***
Liabilitas						***Liabilities***
Liabilitas jangka pendek lainnya	-	-	1.121.436.639	-	1.121.436.639	*Other current liabilities*
Utang bank jangka panjang	4.285.646.893	33.645.966.505	72.157.761	588.505.854	38.592.277.013	*Long-term bank loan*
Liabilitas jangka panjang lainnya	-	300.758.403	-	-	300.758.403	*Other long-term liabilities*
Liabilitas sewa	-	-	363.576.600	442.519.425	806.096.025	*Lease liabilities*
Utang obligasi	-	-	49.988.389	8.487.957.191	8.537.945.580	*Bonds payable*
Total liabilitas	**4.285.646.893**	**33.946.724.908**	**1.607.159.389**	**9.518.982.470**	**49.358.513.660**	***Total liabilities***

Tabel berikut menyajikan jumlah tercatat berdasarkan jatuh tempo dari aset dan liabilitas Grup yang terekspos terhadap risiko suku bunga pada tanggal 31 Desember 2024.

The following table presents the carrying amount by maturity of the Group's assets and liabilities exposed to interest rate risk as of December 31, 2024.

	Suku bunga mengambang/ *Floating interest rate*		Suku bunga tetap/ *Fixed interest rate*			
	≤ 1 tahun/ *≤ 1 year*	> 1 tahun/ *> 1 year*	≤ 1 tahun/ *≤ 1 year*	> 1 tahun/ *> 1 year*	Total	
Aset						***Assets***
Kas dan setara kas	4.355.721.399	-	15.997.222.547	-	20.352.943.946	*Cash and cash equivalent*
Investasi jangka pendek	-	-	375.942.057	-	375.942.057	*Short-term investments*
Total aset	**4.355.721.399**	**-**	**16.373.164.604**	**-**	**20.728.886.003**	***Total assets***
Liabilitas						***Liabilities***
Liabilitas jangka pendek lainnya		-	915.260.418	-	915.260.418	*Other current liabilities*
Utang bank jangka panjang	1.099.409.228	23.540.249.170	-	-	24.639.658.398	*Long-term bank loan*
Liabilitas jangka panjang lainnya	-	292.630.256	-	-	292.630.256	*Other long-term liabilities*
Liabilitas sewa	-	-	134.702.846	775.556.684	910.259.530	*Lease liabilities*
Utang obligasi	-	-	18.446.568.351	8.249.264.237	26.695.832.588	*Bonds payable*
Total liabilitas	**1.099.409.228**	**23.832.879.426**	**19.496.531.615**	**9.024.820.921**	**53.453.641.190**	***Total liabilities***

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

47. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

47. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

Risiko Kredit

Credit Risk

Risiko kredit adalah risiko bahwa Grup akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan atau pihak lawan akibat gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya. Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan.

Credit risk is the risk that the Group will incur a loss arising from the customers or counterparties which fail to fulfill their contractual obligations. Management believes that there are no significant concentrations of credit risk.

Grup mengendalikan risiko kredit dengan cara melakukan hubungan usaha dengan pihak lain yang memiliki kredibilitas, memberikan batasan atau plafon kepada pihak ketiga yang akan melakukan perdagangan kredit dengan Grup dan melakukan pemantauan atas posisi piutang pelanggan secara teratur.

The Group manages and controls the credit risk by dealing only with recognized and credit worthy parties, providing limits or ceiling to a third party who will engage in credit trade with the Group and monitoring the outstanding trade receivables on a regular basis.

Grup memiliki risiko kredit yang terutama berasal dari simpanan di bank, investasi jangka pendek, piutang usaha dan piutang lain-lain, aset kontrak dan aset lain-lain.

The Group is exposed to credit risk primarily from deposits with banks, short-term investments, trade and other receivables, contract assets and other assets.

Eksposur risiko kredit terhadap aset pada laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai berikut:

Credit risk exposure relating to assets in the consolidated statements of financial position is as follow:

	31 Desember 2025/ *December 31 , 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
Aset Keuangan			***Financial Assets***
Bank dan setara kas	15.565.991.343	20.351.233.931	*Cash in banks and cash equivalents*
Investasi jangka pendek	264.233.122	375.942.057	*Short-term investments*
Piutang usaha	1.930.751.464	2.013.161.922	*Trade receivables*
Piutang lain-lain	206.260.223	181.684.666	*Other receivables*
Aset kontrak	237.495.521	279.306.945	*Contract assets*
Aset lancar lainnya	1.555.904.807	1.342.811.421	*Other current assets*
Aset tidak lancar lainnya	1.923.735.582	576.527.502	*Other non-current assets*
Total	**21.684.372.062**	**25.120.668.444**	***Total***

Salah satu risiko kredit utama yang dihadapi oleh Grup adalah kredit yang diberikan kepada pelanggan. Untuk meringankan risiko kredit ini, Grup memiliki kebijakan dimana Grup melakukan verifikasi kredit untuk memastikan bahwa pelanggan yang diberikan kredit oleh Grup memiliki sejarah kredit yang baik dan dapat dipercaya.

One of the main credit risk faced by the Group is credit granted to customers. To mitigate this credit risk, the Group has a policy in which the Group performs credit verification to ensure that customers who are granted credit by the Group have a good credit history and are trustworthy.

Bank dan Setara Kas

Cash in Bank and Cash Equivalents

Manajemen berkeyakinan bahwa konsentrasi risiko kredit atas penempatan rekening koran dan deposito sudah dikelola oleh manajemen sesuai dengan kebijakan manajemen risiko Grup.

Management believes that the concentration of credit risk of the placement of current accounts and deposits has been managed by management in accordance with the Group risk management policies.

47. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

Investasi Jangka Pendek

Manajemen berkeyakinan bahwa konsentrasi risiko kredit atas penempatan deposito sudah dikelola oleh manajemen sesuai dengan kebijakan manajemen risiko Grup.

PIutang Usaha

Manajemen meyakini bahwa tidak ada konsentrasi risiko kredit yang signifikan atas piutang usaha.

Piutang Lain-lain

Manajemen meyakini bahwa tidak ada konsentrasi risiko kredit yang signifikan atas piutang lain-lain.

Aset Kontrak

Manajemen meyakini bahwa tidak ada konsentrasi risiko kredit yang signifikan atas aset kontrak.

Aset Lancar Lainnya

Manajemen meyakini bahwa tidak ada konsentrasi risiko kredit yang signifikan atas aset lancar lainnya.

Aset Tidak Lancar Lainnya

Manajemen meyakini bahwa tidak ada konsentrasi risiko kredit yang signifikan atas aset tidak lancar lainnya.

Selain itu, saldo piutang Grup dipantau secara berkala untuk mengurangi kemungkinan piutang yang tak tertagih.

47. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

Credit Risk (continued)

Short-Term Investments

Management believes that the concentration of credit risk of the placement of deposits has been managed by management in accordance with the Group risk management policies.

Trade Receivables

Management believes that there is no significant concentration of credit risk related to the trade receivables.

Other Receivables

Management believes that there is no significant concentration of credit risk related to the other receivables.

Contract Assets

Management believes that there is no significant concentration of credit risk related to the contract assets.

Other Current Assets

Management believes that there is no significant concentration of credit risk related to the other current assets.

Other Non-Current Assets

Management believes that there is no significant concentration of credit risk related to the other non-current assets.

In addition, the Group's receivables balances are monitored regularly to reduce the possibility of uncollectible receivables.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

47. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

47. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

Risiko Kredit (lanjutan)

Credit Risk (continued)

Tabel berikut ini menyajikan analisis umur piutang usaha:

The following table presents the aging analysis of trade receivables:

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
Belum jatuh tempo	1.050.955.923	1.105.410.176	*Not yet overdue*
Lewat jatuh tempo			*Overdue*
1-90 hari	774.970.358	822.598.879	*1-90 days*
91-180 hari	107.315.716	96.023.747	*91-180 days*
Lebih dari 180 hari	1.159.166.916	1.193.661.742	*More than 180 days*
Sub-total	3.092.408.913	3.217.694.544	*Sub-total*
Dikurangi:			*Less:*
Penyisihan penurunan nilai	(1.161.657.449)	(1.204.532.621)	*Allowance for impairment*
Neto	**1.930.751.464**	**2.013.161.923**	***Net***

Risiko piutang usaha yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai untuk mengalami penurunan nilai adalah kecil karena pelanggan yang diberi kredit memiliki sejarah dan jejak kredit yang baik dengan Grup. Penyisihan khusus mungkin dibuat jika piutang dianggap tak tertagih menurut penilaian Grup.

The risk of trade receivables that are neither past due nor impaired to be impaired is small because customers who are granted credit have a good credit history and track record with the Group. Specific allowance may be made if receivables are deemed uncollectible in the Group's judgement.

Risiko Likuiditas

Liquidity Risk

Risiko likuiditas adalah suatu risiko yang dapat terjadi dimana pendapatan jangka pendek tidak dapat menutupi pengeluaran jangka pendek.

Liquidity risk is a risk that occurs when short-term revenue cannot cover short-term expenditure.

Mengingat bahwa kebutuhan dana Grup saat ini cukup signifikan sebagai akibat dari meningkatnya aktivitas pengembangan atau perluasan bisnis, maka dalam mengelola risiko likuiditas, Grup terus menerus memantau dan menjaga tingkat kas dan setara kas agar memadai untuk membiayai kebutuhan operasional Grup.

Given that funding requirements of the Group are currently significant as a result of increased activity in development or expansion of business, in managing liquidity risk, the Group continues to monitor and maintain levels of adequacy of cash and cash equivalents to finance the operational needs of the Group.

47. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

47. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

Risiko Likuiditas (lanjutan)

Selain itu, Grup juga secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas untuk mengatasi dampak dari fluktuasi arus kas, termasuk jadwal jatuh tempo liabilitas jangka panjang dan terus menelaah kondisi pasar keuangan untuk inisiatif penempatan dan penggalangan dana yang meliputi pinjaman bank, penerbitan ekuitas pasar modal dan ekuitas utang.

Tabel berikut ini menunjukan profil jangka waktu pembayaran liabilitas Grup berdasarkan pembayaran dalam kontrak.

Liquidity Risk (continued)

In addition, the Group also regularly evaluates cash flow projections and actual cash to cope with the impact of fluctuations in cash flow, including the maturity schedule of long-term liabilities and continue to examine the condition of financial markets for placement and fund-raising initiatives, including bank loans, issuance of equity and debt securities.

The table below summarizes the maturity profile of the Group's financial liabilities based on contractual payments.

2025

	< 1 tahun/ *< 1 year*	1 - 2 tahun/ *1 - 2 years*	2 - 3 tahun/ *2 - 3 years*	> 3 tahun/ *> 3 years*	Jumlah/ *Total*	
Utang usaha	932.282.855	-	-	-	932.282.855	*Trade payables*
Beban akrual	9.414.369.377	-	-	-	9.414.369.377	*Accrued expenses*
Liabilitas jangka pendek lainnya	1.141.436.639	-	-	-	1.141.436.639	*Other short-term liabilities*
Utang obligasi	49.988.389	799.774.757	-	7.688.182.434	8.537.945.580	*Bonds payable*
Utang bank jangka panjang	5.769.157.824	6.903.101.323	10.099.223.888	25.967.670.930	48.739.153.965	*Long-term bank loan*
Liabilitas jangka panjang lainnya	343.512	5.272.194	18.320.189	276.822.508	300.758.403	*Other long-term liabilities*
Liabilitas sewa	361.588.045	96.346.443	37.826.814	800.065.383	1.295.826.685	*Lease liabilities*
Total	**17.669.166.642**	**7.804.494.717**	**10.155.370.891**	**34.732.741.254**	**70.361.773.504**	***Total***

2024

	< 1 tahun/ *< 1 year*	1 - 2 tahun/ *1 - 2 years*	2 - 3 tahun/ *2 - 3 years*	> 3 tahun/ *> 3 years*	Jumlah/ *Total*	
Utang usaha	1.343.623.419	-	-	-	1.343.623.419	*Trade payables*
Beban akrual	6.666.411.251	-	-	-	6.666.411.251	*Accrued expenses*
Liabilitas jangka pendek lainnya	915.260.418	-	-	-	915.260.418	*Other short-term liabilities*
Utang obligasi	18.445.598.694	-	-	8.227.912.439	26.673.511.133	*Bonds payable*
Utang bank jangka panjang	1.140.718.029	3.911.610.420	6.868.313.198	12.875.450.820	24.796.092.467	*Long-term bank loan*
Liabilitas jangka panjang lainnya	-	-	-	255.686.279	255.686.279	*Other long-term liabilities*
Liabilitas sewa	474.573.607	555.179.392	786.107.430	8.822.012.445	10.637.872.874	*Lease liabilities*
Total	**28.986.185.418**	**4.466.789.812**	**7.654.420.628**	**30.181.061.983**	**71.288.457.841**	***Total***

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

48. PERJANJIAN KONSESI

a) Pembangunan dan Pengoperasian

Perusahaan mengadakan beberapa perjanjian konsesi dengan Otoritas Pelabuhan sehubungan dengan pembangunan dan pengoperasian pelabuhan dimana Perusahaan diberi hak untuk membangun dan mengoperasikan pelabuhan dalam area konsesi. Perusahaan diwajibkan untuk membayar biaya konsesi kepada Otoritas Pelabuhan sesuai dengan tarif yang ditetapkan dalam setiap perjanjian konsesi dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada saat perjanjian konsesi berakhir, Perusahaan diwajibkan untuk menyerahkan aset yang berada di atas area konsesi kepada Otoritas Pelabuhan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian konsesi.

48. CONCESSION AGREEMENTS

a) Construction and Operation

The Company entered into several concession agreement with Port Authority in relation to construction and operation of port where the Company is granted the rights to construct and operate port within concession area. The Company is obliged to pay concession fee to the Port Authority in accordance with the set rate in each of concession agreement in form of Non Tax State Income. At the end of the concession agreement, the Company is obliged to transfer the assets on concession area to the Port Authority in accordance with the terms stipulated in concession agreement.

Area Konsesi/ *Concession Area*	**Pihak yang Terkait dengan Perjanjian/ *Parties Related to Agreement***	**Tanggal Perjanjian/ *Date of Agreement***	**Jangka Waktu Perjanjian/ *Agreement Periods***	**Tarif Konsesi/ *Concession Rate***
Kalibaru	Perusahaan dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok/ *The Company and Tanjung Priok Port Authority*	31 Agustus/ *August* 2012	70 tahun/*years*	0,5% dari pendapatan kotor/ *0.5% of gross revenue*
Kijing	Perusahaan dan Otoritas Pelabuhan Pontianak/ *The Company and Pontianak Port Authority*	12 Juli/*July* 2018	69 tahun/*years*	2,5% dari pendapatan kotor/ *2.5% of gross revenue*
Kuala Tanjung	Perusahaan dan Otoritas Pelabuhan Kuala Tanjung/ *The Company and Kuala Tanjung Port Authority*	23 Januari/ *January* 2015	69 tahun/*years*	2,5% dari pendapatan kotor/ *2.5% of gross revenue*
Belawan Fase 2	Perusahaan dan Otoritas Pelabuhan Belawan/ *The Company and Belawan Port Authority*	4 April/*April* 2014	70 tahun/*years*	2,5% dari pendapatan kotor/ *2.5% of gross revenue*
Tanjung Perak (Alur Pelayaran Barat Surabaya)	Perusahaan dan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia/ *The Company and Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia*	8 Mei/*May* 2014	25 tahun/*years*	3,5% dari pendapatan kotor/ *3.5% of gross revenue*

48. PERJANJIAN KONSESI (lanjutan)

a) Pembangunan dan Pengoperasian (lanjutan)

Perusahaan mengadakan beberapa perjanjian konsesi dengan Otoritas Pelabuhan sehubungan dengan pembangunan dan pengoperasian pelabuhan dimana Perusahaan diberi hak untuk membangun dan mengoperasikan pelabuhan dalam area konsesi. Perusahaan diwajibkan untuk membayar biaya konsesi kepada Otoritas Pelabuhan sesuai dengan tarif yang ditetapkan dalam setiap perjanjian konsesi dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada saat perjanjian konsesi berakhir, Perusahaan diwajibkan untuk menyerahkan aset yang berada di atas area konsesi kepada Otoritas Pelabuhan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian konsesi. (lanjutan)

48. CONCESSION AGREEMENTS (continued)

a) Construction and Operation (continued)

The Company entered into several concession agreement with Port Authority in relation to construction and operation of port where the Company is granted the rights to construct and operate port within concession area. The Company is obliged to pay concession fee to the Port Authority in accordance with the set rate in each of concession agreement in form of Non Tax State Income. At the end of the concession agreement, the Company is obliged to transfer the assets on concession area to the Port Authority in accordance with the terms stipulated in concession agreement. (continued)

Area Konsesi/ *Concession Area*	**Pihak yang Terkait dengan Perjanjian/ *Parties Related to Agreement***	**Tanggal Perjanjian/ *Date of Agreement***	**Jangka Waktu Perjanjian/ *Agreement Periods***	**Tarif Konsesi/ *Concession Rate***
Teluk Lamong	Perusahaan dan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia/ *The Company and Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia*	19 Mei/*May* 2015	72 tahun/*years*	2,5% dari pendapatan kotor/ *2.5% of gross revenue*
Makassar New Port	Perusahaan dan Otoritas Pelabuhan Makassar/ *The Company and Makassar Port Authority*	19 Mei/*May* 2015	70 tahun/*years*	2,5% dari pendapatan kotor/ *2.5% of gross revenue*
Jalan Tol Cibitung-Cilincing	CTP dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ *CTP and Ministry of Public Works and Human Settlements*	29 Januari/ *January* 2007	50 tahun/*years*	-
Kendari New Port	Perusahaan dan Otoritas Pelabuhan Kendari/ *The Company and Kendari Port Authority*	25 November/ *November* 2022	67 tahun/*years* dan/*and* 11 bulan/*months*	2,5% dari pendapatan kotor/ *2.5% of gross revenue*
Gresik	BMS dan Otoritas Pelabuhan Gresik/*BMS and Gresik Port Authority*	15 Desember/ *December* 2017	76 tahun/*years*	2,75% dari pendapatan kotor/ *2.75% of gross revenue*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

48. PERJANJIAN KONSESI (lanjutan)

b) Pelabuhan yang Diusahakan Perusahaan

Perusahaan mengadakan beberapa perjanjian konsesi dengan Otoritas Pelabuhan sehubungan dengan kegiatan pengusahaan di pelabuhan yang diusahakan oleh Perusahaan yang mencakup pemberian hak dari Otoritas Pelabuhan kepada Perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan di area konsesi yang diusahakan oleh Perusahaan sesuai dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Perusahaan diwajibkan untuk membayar biaya konsesi kepada Otoritas Pelabuhan sesuai dengan tarif yang ditetapkan dalam setiap perjanjian konsesi dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada saat berakhirnya perjanjian konsesi ini, seluruh aset Perusahaan di dalam area konsesi, termasuk tanah yang berstatus hak pengelolaan atas nama dan/atau tanah yang tercatat sebagai aset Perusahaan, tetap menjadi aset dan hak pengelolaan dan/atau tanah Perusahaan.

48. CONCESSION AGREEMENTS (continued)

b) Port Operated by The Company

The Company entered into several concession agreement with Port Authority in relation to operational activities at port that was operated by the Company which includes granting rights from the Port Authority to the Company to perform operation on providing and/or servicing of port services on operated concession area in accordance with Law No. 17 Year 2008 of Sailing. The Company is obliged to pay concession fee to the Port Authority in accordance with the set rate in each of concession agreement in form of Non Tax State Income. At the end of Concession Agreement, all the Company's assets in the concession area, including landrights and/or land recorded as the Company's assets, will remain assets and landrights and/or land of the Company.

Area Konsesi/ *Concession Area*	**Pihak yang Terkait dengan Perjanjian/ *Parties Related to Agreement***	**Tanggal Perjanjian/ *Date of Agreement***	**Jangka Waktu Perjanjian/ *Agreement Periods***	**Tarif Konsesi/ *Concession Rate***
Tanjung Priok	Perusahaan dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok/ *The Company and Tanjung Priok Port Authority*	11 November/ *November* 2015	50 tahun/*years*	2,5% dari pendapatan kotor/ *2.5% of gross revenue*
Belawan	Perusahaan dan Otoritas Pelabuhan Belawan/ *The Company and Belawan Port Authority*	9 November/ *November* 2015	30 tahun/*years*	2,5% dari pendapatan kotor/ *2.5% of gross revenue*
Tanjung Perak	Perusahaan dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Perak/ *The Company and Tanjung Perak Port Authority*	9 November/ *November* 2015	30 tahun/*years*	2,5% dari pendapatan kotor/ *2.5% of gross revenue*
Makassar	Perusahaan dan Otoritas Pelabuhan Makassar/ *The Company and Makassar Port Authority*	9 November/ *November* 2015	30 tahun/*years*	2,5% dari pendapatan kotor/ *2.5% of gross revenue*

48. PERJANJIAN KONSESI (lanjutan)

c) Kerja sama Pemanfaatan Barang Milik Negara (KSP BMN)

Perusahaan mengadakan beberapa perjanjian Kerja sama Pemanfaatan Barang Milik Negara ("KSP BMN") dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementrian Perhubungan. Perusahaan berhak mengoperasikan dan melaksanakan kegiatan pelayanan jasa kepelabuhanan dan jasa terkait kepelabuhanan di area kerja sama. Kerja sama ini memiliki tujuan untuk meningkatkan penerimaan negara bukan pajak. Adapun aset yang dikerjasamakan adalah aset yang dibiayai oleh APBN dan dimiliki oleh negara kemudian dimanfaatkan oleh Perusahaan tanpa mengubah status kepemilikan aset. Objek Kerja Sama akan dikembalikan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada akhir periode perjanjian.

48. CONCESSION AGREEMENTS (continued)

c) Utilization Cooperation of State Property (KSP BMN)

The Company entered into several Cooperation agreements for the Utilization of State Property ("KSP BMN") with the Ministry of Transportation Directorate of Sea Transportation. The company is able to operate and carry out port service activities and port-related services in the cooperation area. This collaboration aims to increase non-tax state revenues. Meanwhile, the assets being collaborated are assets financed by the APBN and owned by the state and then utilized by the Company without changing the asset ownership status. The objects of cooperation will be returned to the Directorate of Sea Transportation at the end of the agreement period.

Area Kerja sama/ ***Cooperation Area***	**Pihak yang Terkait dengan Perjanjian/** ***Parties Related to Agreement***	**Tanggal Perjanjian/** ***Date of Agreement***	**Jangka Waktu Perjanjian/** ***Agreement Periods***	**Nilai Kontribusi Tetap/** ***Fixed Contribution Value***	**Persentase Bagi Hasil/** ***Percentage of Profit Sharing***
Labuan Bajo	Perusahaan dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut/ *The Company and the Ministry of Transportation Directorate of Sea Transportation*	8 November /*November* 2021 Adendum terakhir/ *latest addendum* 14 Juni/*June* 2021	50 tahun/*years*	Rp171.000 dan selanjutnya naik setiap tahun sebesar 2,95%/ *Rp171,000 and annual increase of 2.95%*	16,81% dari arus kas bersih kegiatan operasi dan kegiatan investasi/*16.81% of the net cash flow from operating activities and investing activities*
Badas	Perusahaan dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut/ *The Company and the Ministry of Transportation Directorate of Sea Transportation*	7 April/*April* 2022 Adendum terakhir/ *latest addendum* 14 Juni/*June 2023*	30 tahun/*years*	Rp916.390 dan selanjutnya naik setiap tahun sebesar 2,88%/ *Rp916,390 and annual increase of 2.88%*	46,55% dari arus kas bersih kegiatan operasi dan kegiatan investasi/ *46.55% of the net cash flow from operating activities and investing activities*
Waingapu	Perusahaan dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut/ *The Company and the Ministry of Transportation Directorate of Sea Transportation*	7 April/*April* 2022 Adendum terakhir/ *latest addendum* 14 Juni/*June 2023*	30 tahun/*years*	Rp572.051 dan selanjutnya naik setiap tahun sebesar 1,93% / *Rp572,051 and annual increase of 1.93%*	44,29% dari arus kas bersih kegiatan operasi dan kegiatan investasi/ *44.29% of the net cash flow from operating activities and investing activities*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

48. PERJANJIAN KONSESI (lanjutan)

c) Kerja sama Pemanfaatan Barang Milik Negara (KSP BMN) (lanjutan)

Perusahaan mengadakan beberapa perjanjian Kerja sama Pemanfaatan Barang Milik Negara ("KSP BMN") dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementrian Perhubungan. Perusahaan berhak mengoperasikan dan melaksanakan kegiatan pelayanan jasa kepelabuhanan dan jasa terkait kepelabuhanan di area kerja sama. Kerja sama ini memiliki tujuan untuk meningkatkan penerimaan negara bukan pajak. Adapun aset yang dikerjasamakan adalah aset yang dibiayai oleh APBN dan dimiliki oleh negara kemudian dimanfaatkan oleh Perusahaan tanpa mengubah status kepemilikan aset. Objek Kerja sama akan dikembalikan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada akhir periode perjanjian. (lanjutan)

48. CONCESSION AGREEMENTS (continued)

c) Utilization Cooperation of State Property (KSP BMN) (continued)

The Company entered into several Cooperation agreements for the Utilization of State Property ("KSP BMN") with the Ministry of Transportation Directorate of Sea Transportation. The company is able to operate and carry out port service activities and port-related services in the cooperation area. This collaboration aims to increase non-tax state revenues. Meanwhile, the assets being collaborated are assets financed by the APBN and owned by the state and then utilized by the Company without changing the asset ownership status. The objects of cooperation will be returned to the Directorate of Sea Transportation at the end of the agreement period.(continued)

Area Kerja sama/ ***Cooperation Area***	**Pihak yang Terkait dengan Perjanjian/** ***Parties Related to Agreement***	**Tanggal Perjanjian/** ***Date of Agreement***	**Jangka Waktu Perjanjian/** ***Agreement Periods***	**Nilai Kontribusi Tetap/** ***Fixed Contribution Value***	**Persentase Bagi Hasil/*Percentage of Profit Sharing***
Bima	Perusahaan dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut/ *The Company and the Ministry of Transportation Directorate of Sea Transportation*	7 September/ *September* 2022	30 tahun/*years*	Rp759.982 dan selanjutnya naik setiap tahun sebesar 2,12%/ *Rp759,982 and an annual increase of 2.12%*	28,81% dari arus kas bersih kegiatan operasi dan kegiatan investasi/ *28.81% of the net cash flow from operating activities and investing activities*
Sintete	Perusahaan dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut/ *The Company and the Ministry of Transportation Directorate of Sea Transportation*	20 Agustus/ *August* 2017	15 tahun/*years*	Rp56.807 dan selanjutnya naik setiap tahun sebesar 4,81%/ *Rp56,807 and an annual increase of 4.81%*	43,94% dari arus kas bersih berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit/ *43.94% of the net cash flow based on audited consolidated financial statement*
Garongkong	Perusahaan dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut/ *The Company and the Ministry of Transportation Directorate of Sea Transportation*	14 Juni/ *June* 2022 Adendum terakhir/ *latest addendum* 14 Juni/*June* 2023	50 tahun/*years*	Rp2.661.969 dan selanjutnya naik setiap tahun sebesar 5,00%/ *Rp2,661,969 and an annual increase of 5.00%*	5,25% dari pendapatan/ *5.25% of revenue*

48. PERJANJIAN KONSESI (lanjutan)

d) Perjanjian Sewa Barang Milik Negara ("BMN") - Belawan

Pada tanggal 27 Oktober 2020, sebagaimana telah diadendum pada tanggal 22 April 2021, Perusahaan dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menandatangani perjanjian untuk Pelaksanaan Sewa BMN dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan. Dalam perjanjian disepakati bahwa Perusahaan menyewa objek sewa berupa tanah lapangan penimbunan barang konstruksi beton pada Pelabuhan Utama Belawan seluas 125.258 m^2 dengan jangka waktu 50 tahun dan nilai sewa sebesar Rp1.679.486.255.

e) Perjanjian Penugasan Kuala Tanjung

Pada tanggal 13 Februari 2015, sebagaimana telah digantikan dan diandendum masing-masing pada tanggal 10 Februari 2016 dan tanggal 20 Maret 2017, Perusahaan dan PMT menandatangani perjanjian untuk pembangunan, pembiayaan dan pengelolaan terminal *multipurpose* Kuala Tanjung serta pemanfaatan dan pengelolaan lahan. Berdasarkan perjanjian, PMT diharuskan untuk melakukan pembayaran kompensasi sebesar persentase tertentu dari pendapatan kotor pengelolaan terminal *multipurpose* Kuala Tanjung kepada Perusahaan. Perjanjian tersebut berlaku selama 50 (lima puluh) tahun terhitung sejak tanggal 13 Februari 2015 sampai dengan 12 Februari 2065.

f) Perjanjian Penugasan Belawan Fase 2

Pada tanggal 31 Oktober 2014, sebagaimana telah digantikan pada tanggal 18 Mei 2018, Perusahaan dan PTP1 menandatangani perjanjian untuk pembangunan dan pengelolaan terminal petikemas Belawan Fase 2. Berdasarkan perjanjian, PTP1 diharuskan untuk melakukan pembayaran kompensasi sebesar persentase tertentu dari pendapatan kotor pengelolaan terminal petikemas Belawan Fase 2 kepada Perusahaan. Perjanjian tersebut berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2014 sampai dengan 30 Oktober 2044.

48. CONCESSION AGREEMENTS (continued)

d) State Property ("BMN") Lease Agreement - Belawan

On October 27, 2020, as amended on April 22, 2021, the Company and the Directorate General of Sea Transportation of the Ministry of Transportation signed an agreement for the Implementation of BMN Lease for Infrastructure Provision at the Belawan Main Port Authority Office. In the agreement, it was agreed that the Company rents the lease object in the form of land for storing concrete construction goods at the Belawan Main Port covering an area of 125,258 m^2 with a term of 50 years and a rental value of Rp1,679,486,255.

e) Kuala Tanjung Assignment Agreement

On February 13, 2015, as replaced and amended on February 10, 2016 and March 20, 2017, respectively, the Company and PMT signed agreement for construction, financing, and operation of Kuala Tanjung multipurpose terminal and land utilisation and management. Based on agreement, PMT is obliged to pay compensation of certain percentage of gross revenue from the operation of Kuala Tanjung multipurpose terminal to the Company. The agreement is valid for 50 (fifty) years since February 13, 2015 until February 12, 2065.

f) Belawan Phase 2 Assignment Agreement

On October 31, 2014, as replaced on May 18, 2018, the Company and PTP1 signed agreement for construction and operation of Belawan Phase 2 container terminal. Based on agreement, PTP1 is obliged to pay compensation of certain percentage of gross revenue from the operation of Belawan Phase 2 container terminal to the Company. The agreement is valid for 30 (thirty) years, commencing from October 31, 2014 and ending on October 30, 2044.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

48. PERJANJIAN KONSESI (lanjutan)

f) Perjanjian Penugasan Belawan Fase 2 (lanjutan)

Pada tanggal 26 September 2023, dilakukan amandemen atas nama perjanjian tersebut menjadi "Perjanjian Kerja sama Bangun Guna Serah BNCT" yang memasukkan Fase 1 ke dalam ruang lingkup perjanjian, dan merubah jangka waktu menjadi 55 (lima puluh lima) tahun terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2014 sampai dengan 30 Oktober 2069.

48. CONCESSION AGREEMENTS (continued)

f) Belawan Phase 2 Assignment Agreement (continued)

On September 26, 2023, the name of the agreement was amended to the "BNCT Build-Operate-Transfer Cooperation Agreement," which incorporated Phase 1 into the scope of the agreement and revised the contractual term to 55 (fifty-five) years, commencing from October 31, 2014 and ending on October 30, 2069

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA

a) Perjanjian Pelaksanaan Proyek - SPSL

Perusahaan mendirikan SPSL pada tanggal 5 November 2012. Berdasarkan Surat Perusahaan No. TS.12/1/11/PI.II-13 tanggal 22 Februari 2013, Perusahaan menginstruksikan SPSL untuk mempersiapkan dokumen perjanjian pengalihan (novasi) pekerjaan pembangunan Terminal Kalibaru dengan PT Pembangunan Perumahan (Persero) selaku kontraktor dari Perusahaan kepada SPSL. SPSL juga diminta untuk menunjuk konsultan yang diperlukan dan pelaksanaan *advisory* yang saat ini dilaksanakan oleh Perusahaan akan dialihkan kepada SPSL dimana pembebanan seluruh biaya konsultan diambil dari *proceed* yang akan diterima dari mitra Terminal Kalibaru. Perusahaan kemudian juga mengirimkan Surat No. KU.26/26/13/PI.II-13 tanggal 16 April 2013 yang menginstruksikan SPSL agar segera memproses pekerjaan *Technical*, *Legal*, *Financial*, *Tax* dan *Insurance Advisor*.

Pada tanggal 30 Mei 2013, Perusahaan dan SPSL menandatangani Perjanjian Pelaksanaan Proyek Terminal Kalibaru, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, No. HK.566/8/14/PI.II-13 dan No. HK.566/5/20/PPI-13 ("PIA"), dimana Perusahaan memberikan kepada SPSL hak untuk membangun dan mengoperasikan Terminal Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok.

49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS

a) Project Implementation Agreement - SPSL

The Company established SPSL on November 5, 2012. Based on Letter of the Company No. TS.12/1/11/PI.II-13 dated February 22, 2013, the Company instructed SPSL to prepare the documents for the assignment (novation) agreement on the construction work of Kalibaru Terminal from PT Pembangunan Perumahan (Persero) as the Company's contractor to SPSL. SPSL was also asked to appoint consultants as required and the implementation of advisory services which is currently under contracts with the Company shall be assigned to SPSL in which the consultants' fees shall be taken from proceeds that will be received from the partner of Kalibaru Terminal. The Company then sent Letter No. KU.26/26/13/PI.II-13 dated April 16, 2013 in which it instructed SPSL to process the Technical, Legal, Financial, Tax and Insurance Advisor works.

On May 30, 2013, the Company and SPSL signed Project Implementation Agreement for Kalibaru Terminal, Tanjung Priok Port, Jakarta, No. HK.566/8/14/PI.II-13 and No. HK.566/5/20/PPI-13 ("PIA"), in which the Company granted to SPSL the rights to develop and operate Kalibaru Terminal at Tanjung Priok Port.

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA

a) Perjanjian Pelaksanaan Proyek - SPSL (lanjutan)

PIA berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian Konsesi tertanggal 31 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Perusahaan dengan Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, yaitu selama 70 (tujuh puluh) tahun sejak tanggal dipenuhinya persyaratan dokumen teknis, dokumen finansial serta jaminan pelaksanaan oleh Perusahaan dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok. Inilah yang menjadi dasar hukum SPSL menandatangani COA. Transaksi ini masuk ke dalam kategori sewa keuangan berdasarkan PSAK 116.

Sesuai dengan PIA, Perusahaan dan SPSL selanjutnya harus mengidentifikasi perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perusahaan dan pihak ketiga sehubungan dengan proyek untuk dinovasikan kepada SPSL. Seluruh hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian yang ada akan dinovasikan kepada SPSL.

Pada tanggal 6 Agustus 2018, novasi tidak jadi dilaksanakan dan diganti menjadi sewa/*site lease* yang dituangkan dalam perjanjian perubahan PIA dan telah mengalami beberapa perubahan terakhir pada tanggal 23 Desember 2020 mengenai perubahan nilai dan jangka waktu sewa.

Pada tanggal 30 September 2021, Perusahaan dan SPSL menandatangani Perjanjian Perubahan (Amendemen) Kelima tentang Pelaksanaan Proyek Terminal Kalibaru, Pelabuhan Tanjung Priok No. KS.01/30/9/1/KRJ/UT/PI.II-21 dan No. PJK-621-30092021-001, yang mengatur mengenai:

- Pengubahan Skema Kerja Sama yang sebelumnya Bangun Kelola Serah menjadi *site lease*/sewa;
- Jangka waktu yang sebelumnya 70 (tujuh puluh) tahun menjadi 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Jangka waktu kerja sama terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan 30 September 2043; dan
- Besaran biaya sewa lokasi per tahun sejumlah Rp236.000.000 (belum termasuk PPN) dibayarkan setiap triwulan di setiap awal bulan berjalan.

49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS

a) Project Implementation Agreement - SPSL (continued)

The PIA is valid until the expiration of the term of the Concession Agreement dated August 31, 2012 entered into between the Company and the Port Authority of Tanjung Priok Port, which is 70 (seventy) years from the date of fulfillment of the requirement on technical documents, financial documents and implementation guarantee by the Company and the Port Authority of Tanjung Priok Port. This is the legal basis on which SPSL entered into the COA. This transaction is classified as finance lease based on PSAK 116.

In accordance with the PIA, the Company and SPSL shall then identify the existing agreements signed by the Company and the third parties concerning the project implementation for assignment (novation) to SPSL. All rights and obligations under the existing agreements will be novated to SPSL.

As of August 6, 2018, the novation was not carried out and was changed to a lease/site lease as outlined in the PIA amendment agreement and has undergone several changes recently on December 23, 2020 regarding changes in the value and term of the lease.

On September 30, 2021, the Company and SPSL signed the Fifth Amendment Agreement regarding the Executor of the Kalibaru Terminal Project, Tanjung Priok Port No. KS.01/30/9/1/KRJ/UT/PI.II-21 and No. PJK-621-30092021-001, which regulates:

- *Changing the Cooperation Scheme which was previously Build Manage Handover to site lease;*
- *The previous period of 70 (seventy) years to 23 (twenty three) years;*
- *The cooperation period is from October 1, 2020 to September 30, 2043; and*
- *The annual rental fee is Rp236,000,000 (excluding VAT) and is carried out on a quarterly basis at the beginning of the current month.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

b) Perjanjian Pengelolaan Proyek - SPSL

Manajemen Proyek Kalibaru

Pada tanggal 24 Februari 2014, Perusahaan dan SPSL menandatangani Perjanjian Manajemen Proyek untuk Pekerjaan Pembangunan Terminal Petikemas Kalibaru Utara Tahap 1 Pelabuhan Tanjung Priok No. HK.566/24/2/2/PI.II-14 dan No. PPI-06-1-000495 (“PMA”), dimana Perusahaan menunjuk SPSL untuk menangani manajemen proyek yang akan melaksanakan kontrak-kontrak pekerjaan pembangunan terminal Kalibaru, diantaranya manajemen proyek atas kontrak-kontrak pekerjaan konstruksi serta verifikasi dan evaluasi atas pembayaran pekerjaan konstruksi dan pengawasan. PMA berlaku sampai dengan selesainya proyek. Tidak ada pendapatan untuk SPSL atas penyediaan jasa ini.

Pada tanggal 9 Oktober 2020, Perusahaan dan SPSL menandatangani Berita Acara No. PD.05.01/9/10/2/MPS/TEK/PI.II-20 dan No. BAC-400-09102020-012 tentang Kesepakatan Bersama Rencana Pembaruan Manajemen Proyek Untuk Pekerjaan Pembangunan Terminal Peti Kemas Kalibaru Utara Tahap 1 Pelabuhan Tanjung Priok.

Adapun maksud dalam Berita Acara ini adalah kesepakatan bersama untuk melakukan pembaruan terhadap PMA karena PIA telah mengalami perubahan skema kerja sama sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap PMA. Maka, Perusahaan dan SPSL bersepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama Baru yang akan menggantikan PMA.

Pada tanggal 18 Desember 2020, Perusahaan dan SPSL menandatangani Perjanjian tentang Kerja Sama Pembangunan Terminal Kalibaru Utara Tahap I di Pelabuhan Tanjung Priok No.PD.05.01/18/12/1/MPS/TEK/PI.II-20 dan No.PJK-621-18122020-006.

49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

b) Project Management Agreement - SPSL

Project Management of Kalibaru

On February 24, 2014, the Company and SPSL signed Project Management Agreement on the Construction Work for the North Kalibaru Container Terminal Phase 1 at the Port of Tanjung Priok No. HK.566/24/2/2/PI.II-14 and No. PPI-06-1-000495 (“PMA”), in which the Company appointed SPSL as a project management company to carry out the contractual works of Kalibaru terminal development, among others, the project management of construction works contracts and verification and evaluation on payment of construction and supervision works. The PMA is valid until the end of the project. There is no profit for SPSL for providing this service.

On October 9, 2020, the Company and SPSL signed the Minutes No. PD.05.01/9/10/2/MPS/TEK/PI.II-20 and No. BAC-400-09102020-012 concerning Mutual Agreement on Project Management Renewal Plan for Construction Work on Phase 1 of North Kalibaru Container Terminal at Tanjung Priok Port.

The intention in this Minutes is a mutual agreement to make updates to PMA because PIA has undergone a change in the cooperation scheme so that adjustments need to be made to PMA. So, the Company and SPSL agreed to make a New Cooperation Agreement that would replace PMA.

On December 18, 2020, the Company and SPSL agreed on the Agreement on the Construction of Phase I of the North Kalibaru Terminal at Tanjung Priok Port No. PD.05.01/18/12/1/MPS/TEK/PI.II-20 and No.PJK-621-18122020-006.

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

b) Perjanjian Pengelolaan Proyek - SPSL (lanjutan)

Manajemen Proyek Kalibaru (lanjutan)

Adapun maksud dari perjanjian adalah untuk memberikan landasan dan kepastian hukum bagi Perusahaan dan SPSL dalam pelaksanaan kerja sama manajemen proyek pembangunan Terminal Kalibaru I Pelabuhan Tanjung Priok.

Pada tanggal 29 September 2021, Perusahaan dan SPSL menandatangani perjanjian Kerja sama Khusus Manajemen Proyek Pembangunan Terminal Kalibaru Utara Tahap I Periode 2021 sampai dengan 2022 Pelabuhan Tanjung Priok No. PD.05.01/29/9/10/MPS/TEK/PI.II-21 dan No. PJK-621-29092021-006. Jangka waktu perjanjian ini adalah 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender sejak Berita Acara Mulai Kerja (BAMK) ditandatangani dengan total biaya pelaksanaan sebesar Rp20.314.227 (termasuk PPN).

Pada tanggal 3 November 2022, Perusahaan dan SPSL menandatangani Perjanjian tentang Kerja Sama Khusus Manajamen Proyek Terminal Kalibaru Tahap I Periode 2022 sampai dengan 2023 Pelabuhan Tanjung Priok No. PD.05/01/3/ 11/1/PM01/INVS/PLND-22 dan No. PD.05. 01/3/11/1/KPKB/DIUT/PLSL -22 mengenai pengelolaan Proyek Terminal Kalibaru Tahap I di Pelabuhan Tanjung Priok. Jangka waktu perjanjian ini adalah 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender sejak Berita Acara Mulai Kerja (BAMK) ditandatangani dengan total biaya pelaksanaan sebesar Rp17.260.258 (belum termasuk PPN).

Pada tanggal 3 Oktober 2023, SPSL menandatangani berita acara atas pengalihan manajemen proyek untuk Terminal Kalibaru Tahap I dengan Perusahaan. Berdasarkan berita acara tersebut, manajemen Proyek Pembangunan Terminal Kalibaru Tahap I beralih ke Perusahaan.

49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

b) Project Management Agreement - SPSL (continued)

Project Management of Kalibaru (continued)

The purpose of the agreement is to provide a legal basis and certainty for the Company and SPSL in performing of cooperation in the management of the Kalibaru I Terminal construction project at the Port of Tanjung Priok.

On September 29, 2021, Company and SPSL signed a Special Cooperation Agreement for the Management of the North Kalibaru Terminal Development Phase I for the 2021 to 2022 of Tanjung Priok Port No. PD.05.01/29/9/10/MPS/TEK/PI.II-21 and No. PJK-621-29092021-006. The term of agreement is 365 (three hundred and sixty five) calendar days since the Minutes of Work Start (BAMK) is signed with a total cost of Rp20,314,227 (including VAT).

On November 3, 2022, the Company and SPSL signed a Special Cooperation Agreement for the Management for the Kalibaru Terminal Development Phase I for the 2022 to 2023 of Tanjung Priok Port No. PD.05/01/3/11/1/PM01/INVS/PLND-22 and No. PD.05.01/3/11/1/KPKB/DIUT/ PLSL-22 regarding management of Kalibaru Terminal Project Phase I at Tanjung Priok Port. The term of agreement is 365 (three hundred and sixty five) calendar days since the Minutes of Work Start (BAMK) is signed with a total cost of Rp17,260,258 (excluding VAT).

On October 3, 2023, SPSL signed a novation memorandum of project management for the Kalibaru Terminal Development Phase I with the Company. Based on the memorandum, project management for the Kalibaru Terminal Development Phase I is transfered to the Company.

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

b) Perjanjian Pengelolaan Proyek - SPSL (lanjutan)

Manajemen Proyek Kijing

Pada tanggal 29 April 2019, Perusahaan dan SPSL menandatangani Perjanjian tentang Kerja Sama Pembangunan dan Pengembangan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak di Kalimantan Barat No. KS.01/29/4/1/KRJ/UT/PI.II-19 dan No. PJK-KJG-06-29042019-010.

Pada tanggal 23 Oktober 2020, Perusahaan dan SPSL menandatangani Perjanjian tentang Kerja Sama Pembangunan dan Pengembangan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak di Kalimantan Barat No. KS.02/23/10/1/ MPS/TEK/PI.II-2020 dan No.PJK-621-23102020-009.

Adapun maksud dari perjanjian adalah untuk memberikan landasan dan kepastian hukum bagi Perusahaan dan SPSL dalam pelaksanaan kerja sama pembangunan dan pengembangan terminal Kijing pelabuhan Pontianak di Kalimantan Barat.

Pada tanggal 29 September 2021, Perusahaan dan SPSL menandatangani Perjanjian tentang Kerja Sama Pembangunan dan Pengembangan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak di Kalimantan Barat No. PD.05.01/29/ 9/12/HPS/TEK/PI.II-21 dan No.PJK-621-29092021-013. Jangka waktu perjanjian adalah selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender terhitung sejak Berita Acara Mulai Kerja (BAMK) senilai Rp18.437.391 (belum termasuk PPN).

Pada tanggal 14 November 2022, Perusahaan dan SPSL menandatangani Perjanjian tentang Kerja Sama Pembangunan dan Pengembangan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak di Kalimantan Barat No. PD.05.01/14/11/1/ PMO2/INVS/PLND-22 dan No. PD.05.01/14/11/1/PRTE/DIUT/PLSL-22. Jangka waktu perjanjian adalah selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalander terhitung sejak Berita Acara Mulai Kerja (BAMK) senilai Rp19.299.347 (belum termasuk PPN).

49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

b) Project Management Agreement - SPSL (continued)

Project Management of Kijing

On April 29, 2019, the Company and SPSL agreed on the Agreement on the Construction and Development of the Pontianak Port Kijing Terminal in West Kalimantan No. KS.01/29/4/1/KRJ/UT/PI.II-19 and No. PJK-KJG-06-29042019-010.

On October 23, 2020, the Company and SPSL agreed on the Agreement on the Construction and Development of the Pontianak Port Kijing Terminal in West Kalimantan No. KS.02/23/10/1/MPS/TEK/PI.II-2020 and No. PJK-621-23102020-009.

The purpose of the agreement is to provide a legal basis and certainty for the Company and SPSL in performing construction and development cooperation of Kijing terminal Pontianak port in West Kalimantan.

On September 29, 2021, the Company and SPSL agreed on the Agreement on the Construction and Development of the Pontianak Port Kijing Terminal in West Kalimantan No. PD.05.01/29/9/12/HPS/TEK/PI.II-21 and No. PJK-621-29092021-013. The term of the agreement is 365 (three hundred and sixty five) calendar days starting from the Minutes of Starting Work (BAMK) amounted to Rp18,437,391 (excluding VAT).

On November 14, 2022, the Company and SPSL agreed on the Agreement on the Construction and Development of the Pontianak Port Kijing Terminal in West Kalimantan No. PD.05.01/14/11/1/PMO2/INVS/PLND-22 and No. PD.05.01/14/11/1/PRTE/DIUT/PLSL-22. The term of the agreement is 365 (three hundred and sixty five) calendar days starting from the Minutes of Starting Work (BAMK) amounted to Rp19,299,347 (excluding VAT).

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

b) Perjanjian Pengelolaan Proyek - SPSL (lanjutan)

Manajemen Proyek Kijing (lanjutan)

Pada tanggal 6 September 2023, SPSL menandatangani berita acara atas pengalihan kerja sama Pembangunan dan Pengembangan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak di Kalimantan Barat dengan Perusahaan. Berdasarkan berita acara tersebut, Pembangunan dan Pengembangan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak di Kalimantan Barat yang dikelola SPSL berakhir pada tanggal 24 Oktober 2023 dan tidak dilakukan perpanjangan kerja sama melainkan beralih ke Perusahaan.

c) Perjanjian Konstruksi dan Pengoperasian - NPCT1

Berdasarkan PIA (Catatan 49a), pada tanggal 9 Juni 2014, SPSL dan NPCT1, menandatangani Perjanjian Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Petikemas 1, Pelabuhan Priok Baru (COA) dimana SPSL menunjuk NPCT1 untuk membangun dan mengoperasikan Terminal Petikemas 1 selama jangka waktu sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun setelah beroperasinya dermaga 850 meter dan NPCT1 harus melakukan pembayaran sewa di muka dan biaya sewa kuartalan kepada SPSL.

Pembayaran sewa di muka sebesar USD100.000.000 harus dibayarkan dalam beberapa tahap, yaitu USD30.000.000 setelah tanggal mulai COA, USD40.000.000 setelah penyerahan dermaga 450 meter dan USD30.000.000 setelah penyerahan dermaga 850 meter. Berdasarkan Perjanjian Perubahan Kedua terhadap COA tanggal 24 Desember 2014 (“SAA”), USD30.000.000 akan dibayarkan setelah penyelesaian area lapangan tambahan CY 570 meter. SPSL harus melakukan penyerahan dermaga 450 meter dan dermaga 850 meter kepada NPCT1 masing-masing pada tanggal 31 Juli 2015 dan 31 Desember 2015.

49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

b) Project Management Agreement - SPSL (continued)

Project Management of Kijing (continued)

On September 6, 2023, SPSL signed a novation memorandum of the Construction and Development of the Pontianak Port Kijing Terminal in West Kalimantan with the Company. Based on the memorandum, the Construction and Development of the Pontianak Port Kijing Terminal in West Kalimantan, managed by SPSL, ended on October 24, 2023, and there is no extension of cooperation, instead, transfered to the Company.

c) Construction and Operation Agreement - NPCT1

Based on PIA (Note 49a), on June 9, 2014, SPSL and NPCT1, entered into Construction and Operation Agreement - Container Terminal 1, New Priok Port (COA) through which SPSL appointed NPCT1 to develop and operate Container Terminal 1 for the period of 25 (twenty five) years after the commencement of operation of 850 meters quay and NPCT1 shall pay advance site rent and quarterly site rent to SPSL.

The advance rental fee of USD100,000,000 shall be paid in several stages, which consist of USD30,000,000 after the commencement date, USD40,000,000 after the handover of 450 meters quay and USD30,000,000 after the handover of 850 meters quay. Based on the Second Amendment Agreement to the COA dated December 24, 2014 (“SAA”), the final USD30,000,000 will be paid after the completion of additional yard area CY 570 meters. SPSL shall handover the 450 meters quay and the 850 meters quay to NPCT1 on July 31, 2015 and December 31, 2015, respectively.

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

c) Perjanjian Konstruksi dan Pengoperasian - NPCT1 (lanjutan)

Biaya sewa kuartalan harus dibayarkan pada awal setiap kuartal, yaitu sejumlah USD7.000.000 per kuartal untuk periode beroperasinya dermaga 450 meter sampai dengan beroperasinya dermaga 850 meter dan USD14.000.000 per kuartal untuk periode setelahnya. Pada tanggal 17 September 2014, SPSL menerima pembayaran pertama atas biaya sewa dibayar di muka sebesar USD30.000.000 dari NPCT1 dan dicatat sebagai liabilitas kontrak dalam laporan posisi keuangan konsolidasian (Catatan 28).

Penyerahan dermaga 450 meter tidak terjadi pada tanggal 31 Juli 2015 sebagaimana tercantum dalam SAA. Pada tanggal 1 Agustus 2015, SPSL menerima *Liquidated Damages Notice* dari NPCT1 sehubungan dengan keterlambatan ini. Melalui surat tanggal 26 Agustus 2015, SPSL menyampaikan bahwa keterlambatan penyerahan tidak mengakibatkan NPCT1 mengalami keterlambatan dalam melakukan konstruksinya sehingga hal tersebut bukan merupakan *Liquidated Damage Event*.

Selain itu, penyerahan dermaga 850 meter yang seharusnya dilakukan pada tanggal 31 Desember 2015 dan pekerjaan pengerukan tertentu yang seharusnya diselesaikan SPSL pada tanggal 31 Januari 2016, juga tidak terjadi. SPSL tidak menerima *Liquidated Damages Notice* dari NPCT1 sehubungan dengan keterlambatan tersebut.

Dermaga 450 meter dan 850 meter telah diserahkan oleh SPSL kepada NPCT1 masing-masing pada tanggal 23 Juni 2016 dan 16 Oktober 2016.

Pada tanggal 24 Juni 2016, SPSL menerima pembayaran kedua atas biaya sewa dibayar di muka sebesar USD40.000.000 dari NPCT1. Pada tanggal 31 Desember 2016, dermaga 850 meter belum mulai beroperasi sehingga pembayaran pertama dan kedua atas sewa diterima di muka masing-masing sebesar USD30.000.000 dan USD40.000.000 tersebut dicatat sebagai liabilitas kontrak dalam laporan posisi keuangan konsolidasian (Catatan 28).

Pada tanggal 18 Agustus 2016, dermaga 450 meter telah mulai beroperasi secara komersial.

49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

c) Construction and Operation Agreement - NPCT1 (continued)

The quarterly site rent shall be paid at the beginning of each quarter amounting to USD7,000,000 each quarter for the period after the commencement of operation of 450 meters quay up to the commencement of operation of 850 meters quay and USD14,000,000 each quarter for the period thereafter. On September 17, 2014, SPSL received the first payment of advance rental fee amounting to USD30,000,000 from NPCT1 and are recorded as contract liabilities in the consolidated statement of financial position (Note 28).

The handover of 450 meters quay did not occur on July 31, 2015 as stated in the SAA. On August 1, 2015, SPSL received a Liquidated Damages Notice from NPCT1 in relation to the delay. Through a letter dated August 26, 2015, SPSL responded by stating that the delay in handover did not cause a delay to NPCT1's construction hence it is not a Liquidated Damage Event.

In addition, the handover of 850 meters quay which should have occurred on December 31, 2015 and certain dredging works which should have been completed by SPSL on January 31, 2016, did not occur as well. SPSL has not received any Liquidated Damages Notice from NPCT1 in relation to these delays.

450 meters and 850 meters quays have been handed over by SPSL to NPCT1 on June 23, 2016 and October 16, 2016, respectively.

On June 24, 2016, SPSL received the second payment of advance rental fee amounting to USD40,000,000 from NPCT1. As of December 31, 2016, commencement of operation of 850 meters quay has not yet occurred hence first and second payment of advance site rent amounting to USD30,000,000 and USD40,000,000, respectively, are recorded as contract liabilities in the consolidated statement of financial position (Note 28).

On August 18, 2016, 450 meters quay has started its commercial operation.

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

c) Perjanjian Konstruksi dan Pengoperasian - NPCT1 (lanjutan)

Pada tanggal 13 Desember 2016, SPSL dan NPCT1 menandatangani Surat Persetujuan (LOA) dimana diantaranya mengatur hal-hal sebagai berikut:

- Penyediaan akses oleh SPSL kepada NPCT1 atas area tertentu pada dermaga 850 meter;
- Kesepakatan mengenai tanggal mulai operasi komersial dermaga 450 meter, yaitu tanggal 18 Agustus 2016;
- Pemberitahuan Konfirmasi Pekerjaan Lokasi untuk Dermaga 850 meter diterbitkan pada tanggal 16 Oktober 2016 dengan beberapa pekerjaan yang belum diselesaikan;
- SPSL akan menyelesaikan pekerjaan berikut dengan waktu yang telah ditentukan untuk tiap pekerjaan:
  - Perkuatan sisi utara tanggal 16 Maret 2017;
  - Penyediaan dan pemasangan *variable speed water drive* dan pressure tank dan peralatan terkait tanggal 16 Maret 2017;
  - Pengerukan hingga kedalaman -16m LWS tanggal 31 Mei 2017;
  - Penyelesaian fase kedua dari area *common gate* tanggal 16 Oktober 2017;
  - Penyelesaian hal-hal penting yang belum diselesaikan yang diidentifikasi oleh ahli teknik independen tanggal 16 Maret 2017.
- Kesepakatan bahwa tanggung jawab pemeliharaan area infrastruktur konsesi akan menyesuaikan dengan laporan ahli teknik independen;
- Kesepakatan mengenai tanggal mulai operasional dermaga 850 meter paling lambat tanggal 16 Maret 2017;
- Jika pekerjaan belum diselesaikan pada tanggal-tanggal yang telah ditentukan, NPCT1 akan memperhitungkan pengurangan 25,00% dari pembayaran sewa kuartalan US 14.000.000.000 pada pembayaran sewa kuartalan berikutnya;

49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

c) Construction and Operation Agreement - NPCT1 (continued)

On December 13, 2016, SPSL and NPCT1 signed a Letter of Acceptance (LOA) which regulates items as follows:

- *Provision of access to certain areas within 850 meters quay from SPSL to NPCT1;*
- *Agreement on the date of commencement of operations of 450 meters quay, which was August 18, 2016;*
- *Site Works Confirmation Notice for 850 meters quay was issued on October 16, 2016 with note on certain outstanding works;*
- *SPSL will complete the following works within the time specified for each item:*
  - *Strengthening of north side by March 16, 2017;*
  - *Supplying and installing variable speed water drive and pressure tank and associated equipment by March 16, 2017;*
  - *Dredging to a depth of -16m LWS by May 31, 2017;*
  - *Completion of the second phase of the common gate area by October 16, 2017;*
  - *Completion of major outstanding items identified by the independent engineer by March 16, 2017.*
- *Agreement that the maintenance responsibility of concession area infrastructure will be in accordance with the independent engineer's report;*
- *Agreement that the date of commencement of operations of 850 meters quay will be no later than March 16, 2017;*
- *If the works have not been completed on the predetermined dates, NPCT1 will be credited with 25.00% of quarterly site rent USD14,000,000 on the next payment of quarterly site rent;*

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

c) Perjanjian Konstruksi dan Pengoperasian - NPCT1 (lanjutan)

Pada tanggal 13 Desember 2016, SPSL dan NPCT1 menandatangani Surat Persetujuan (LOA) dimana diantaranya mengatur hal-hal sebagai berikut: (lanjutan)

- Jika terdapat salah satu SPSL Undertaking belum diselesaikan pada tanggal 16 Oktober 2017, NPCT1 hanya akan melakukan pembayaran atas sewa kuartalan dermaga 450 meter, yaitu USD7.000.000 sampai dengan tanggal dimana seluruh SPSL *Undertaking* telah diselesaikan.
- Jika SPSL *Undertaking* belum diselesaikan pada tanggal-tanggal yang telah ditentukan, NPCT1 akan memperhitungkan pengurangan 25% dari pembayaran sewa kuartalan USD14.000.000 pada pembayaran sewa kuartalan berikutnya;

Pada tanggal 16 Januari 2018, SPSL telah berhasil melakukan negosiasi kembali dengan NPCT1 yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan (MOA) sehingga SPSL tidak dikenakan denda sebesar USD7.000.000 terhadap sewa kuartalan sebagaimana disebutkan di atas. Adapun MOA mengatur hal-hal sebagai berikut:

- SPSL akan menyelesaikan pekerjaan berikut dengan waktu yang telah ditentukan untuk tiap pekerjaan:
  - Jalan akses keluar sisi timur area CGA tanggal 15 Desember 2017;
  - Pengoperasian *Go-live* atas sistem IT tanggal 31 Desember 2017;
  - Pengoperasian *Go-live* OCR di CGA tanggal 31 Januari 2018;
  - Perbaikan lapangan penumpukan behandle sisi selatan di CGA tanggal 31 Januari 2018;
  - Jalan akses masuk di sisi barat CGA tanggal 28 Februari 2018;
  - Tambahan area buffer untuk parkir truk di sisi barat CGA tanggal 30 April 2018;
  - Penyediaan fasilitas untuk petikemas *reefer* dan *cooling room* tanggal 30 April 2018;

49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

c) Construction and Operation Agreement - NPCT1 (continued)

On December 13, 2016, SPSL and NPCT1 signed a Letter of Acceptance (LOA) which regulates items as follows: (lanjutan)

- *If any one of the SPSL Undertakings has not been completed by October 16, 2017, NPCT1 will pay quarterly site rent only on the 450 meters quay, which is USD7,000,000 until the date that all SPSL Undertakings have been completed.*
- *If SPSL Undertakings have not been completed on the predetermined dates, NPCT1 will be credited with 25% of quarterly site rent USD14,000,000 on the next payment of quarterly site rent;*

On January 16, 2018, SPSL has succeeded in renegotiating with NPCT1 which was set forth in Memorandum of Agreement (MOA) so that SPSL will not be charged with penalty of USD7,000,000 on the quarterly site rent as mentioned above. The MOA regulates items as follows:

- *SPSL will complete the following works within the time specified for each item:*
  - *East area exit access road of CGA by December 15, 2017;*
  - *Go-live IT system operation by December 31, 2017;*
  - *Go-live OCR operation at CGA by January 31, 2018;*
  - *Reparation of behandle south side dockyard at CGA by January 31, 2018;*
  - *Entry access road west side CGA by February 28, 2018;*
  - *Additional buffer area for trucks park at west side of CGA by April 30, 2018;*
  - *Facility provision for reefer container and cooling room by April 30, 2018;*

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

c) Perjanjian Konstruksi dan Pengoperasian - NPCT1 (lanjutan)

Pada tanggal 16 Januari 2018, SPSL telah berhasil melakukan negosiasi kembali dengan NPCT1 yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan (MOA) sehingga SPSL tidak dikenakan denda sebesar USD7.000.000 terhadap sewa kuartalan sebagaimana disebutkan di atas. Adapun MOA mengatur hal-hal sebagai berikut: (lanjutan)

- SPSL akan menyelesaikan pekerjaan berikut dengan waktu yang telah ditentukan untuk tiap pekerjaan: (lanjutan)
  - Pekerjaan perbaikan jalan akses keluar (lapangan penumpukan behandle sisi utara di CGA) tanggal 30 April 2018;
  - Perbaikan lapangan penumpukan behandle sisi utara di CGA tanggal 31 Mei 2018;
  - Penyediaan fasilitas inspeksi untuk mendukung kegiatan bea dan cukai di CGA tanggal 31 Maret 2019.
- Jika pekerjaan tersebut di atas belum diselesaikan pada tanggal-tanggal yang telah ditentukan, SPSL akan dikenakan pembayaran terhadap setiap pekerjaan sebesar USD5.000/hari kerja.
- Kesepakatan dalam Surat Keputusan mengenai pengurangan pembayaran sewa dicabut.

Pada tanggal 2 November 2020, SPSL membuat kesepakatan bersama dengan NPCT1 (SMA) mengenai sewa lokasi dimuka/*Advance Site Rent* (ASR) yang menjelaskan NPCT1 menyetujui untuk membayar kepada SPSL beberapa bagian dari sewa lokasi di muka (ASR) sebesar USD23.500.000 meskipun penyerahan CY 57 meter belum dipenuhi oleh SPSL. Sesuai dengan ketentuan SMA, SPSL diharuskan mengirimkan pemberitahuan kepada NPCT1 tentang dimulainya pelaksanaan pembangunan CY 57 meter. Pada tanggal 20 April 2020, pembangunan CY 57 meter telah dilanjutkan kembali dan ditargetkan selesai pada bulan Mei 2022.

49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

c) Construction and Operation Agreement - NPCT1 (continued)

On January 16, 2018, SPSL has succeeded in renegotiating with NPCT1 which was set forth in Memorandum of Agreement (MOA) so that SPSL will not be charged with penalty of USD7,000,000 on the quarterly site rent as mentioned above. The MOA regulates items as follows: (continued)

- *SPSL will complete the following works within the time specified for each item: (continued)*
  - *Reparation work of exit access road (north side behandle dockyard at CGA) by April 30, 2018;*
  - *Reparation of north side behandle dockyard at CGA by May 31, 2018;*
  - *Inspection facilities provision to support custom activities at CGA March 31, 2019.*
- *If the above works have not been completed on the predetermined dates, SPSL will pay USD5,000/day for each work.*
- *Agreement on the Letter of Acceptance regarding reduction of rental payment has been waived.*

On November 2, 2020, SPSL entered into a joint agreement with NPCT1 (SMA) regarding Advance Site Rent (ASR) which explained that NPCT1 agreed to pay SPSL some part of the upfront location lease (ASR) of USD23,500,000 despite submission CY 57 meters has not been fulfilled by SPSL. In accordance with SMA regulations, SPSL is required to send a notification to NPCT1 regarding the commencement of the construction of the 57 meter CY. On April 20, 2020, the construction of the 57 meter CY has been resumed and is targeted for completion in May 2022.

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

c) Perjanjian Konstruksi dan Pengoperasian - NPCT1 (lanjutan)

Pada tanggal 29 Desember 2020, SPSL telah menerima ASR tersebut sebesar USD23.500.000 yang dicatat pada liabilitas kontrak.

Pada tanggal 30 Desember 2021, SPSL dan NPCT1 telah menandatangani Berita Acara Kesepakatan tentang Serah Terima Area 57 Meter yang diantaranya menjelaskan bahwa NPCT1 telah menerima penyerahan Area 57 Meter sesuai *Site Work Confirmation Notice* (SWCN) yang diterbitkan oleh *Independent Engineer* (IE), biaya sewa *Quarterly Site Rent* (QSR) dibebaskan dari reduksi 11% menjadi sebesar USD14.000.000 (nilai penuh) mulai tanggal 27 Desember 2021, dan SPSL akan menerbitkan tagihan untuk sisa ASR sebesar USD6.500.000. Pada tanggal 2 Februari 2022, SPSL telah menerima sisa ASR sebesar USD6.500.000 tersebut.

d) Perjanjian Induk Kerja sama Operasi Terminal Petikemas Koja antara Perusahaan dan HPI

Perjanjian Induk Kerja sama Operasi Koja antara Perusahaan dan HPI (Catatan 1d) mengatur syarat-syarat yang menjadi dasar operasional Kerja sama Operasi Terminal Petikemas Koja (KSO TPK Koja).

Aspek keuangan penting yang diatur dalam Perjanjian ini termasuk Amendemennya adalah sebagai berikut:

- Bagian investasi dari Partisipan yang dicantumkan dalam Perjanjian yang telah diubah adalah sebagai berikut:

Perusahaan	54,91%
HPI	45,09%

- Nilai investasi dari kedua Partisipan tergantung pada audit atas investasi yang dilakukan oleh auditor independen.
- Aset tetap yang diserahkan oleh Partisipan untuk dipergunakan dalam operasional terminal dimiliki secara langsung oleh Partisipan dan dicatat dalam masing-masing pembukuannya.

49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

c) Construction and Operation Agreement - NPCT1 (continued)

On December 29, 2020, SPSL received ASR amounting to USD23,500,000 which was recorded as contract liabilities.

On December 30, 2021, SPSL and NPCT1 has signed Minutes of Agreement regarding Handover 57 Meter area which among others explain that NPCT1 has received the handover of 57 Meters Area according to Site Work Confirmation Notice (SWCN) issued by Independent Engineer (IE), Quarterly Site Rent (QSR) rental fee is free from reduction 11% which has full value of USD14,000,000 (full amount) from December 27, 2021, and SPSL will issue a bill for the remaining ASR amounting to USD6,500,000. On February 2, 2022, SPSL has received such remaining ASR amounting to USD6,500,000.

d) The Master Agreement of Kerja sama Operasi Terminal Petikemas Koja between the Company and HPI

The Master Cooperation Agreement between the Company and HPI (Note 1d) sets out the terms and conditions under which Kerja sama Operasi Terminal Petikemas Koja (KSO TPK Koja) is operating.

The principal financial aspects of this Agreement including its amendments are as follows:

- *The investment proportion of the Participants is specified in the revised Agreement as follows:*

54,91%	*The Company*
45,09%	*HPI*

- *Investments by the Participants are subject to audit by an independent auditor.*
- *Fixed assets provided by the Participants for use in the operations of the terminal are owned directly by the Participants and are recorded in their respective accounting records.*

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

d) Perjanjian Induk Kerja sama Operasi Terminal Petikemas Koja antara Perusahaan dan HPI (lanjutan)

Aspek keuangan penting yang diatur dalam Perjanjian ini termasuk Amendemennya adalah sebagai berikut: (lanjutan)

- Partisipan berhak atas pengembalian dana penyusutan aset tetap yang dimiliki oleh masing-masing Partisipan yang digunakan dalam operasi dan berhak menerima laba sesuai dengan investasi dari Partisipan.
- Laba yang dapat dibagikan kepada Partisipan ditentukan setelah pengurangan biaya operasional, royalti, biaya bank dan dana penyusutan aset tetap dari pendapatan.
- Royalti akan dibayarkan kepada Perusahaan apabila arus petikemas tahunan yang dihasilkan melebihi target minimum tahunan yang ditetapkan.
- Jika ada pengeluaran modal baru, kedua belah pihak sepakat untuk membiayai belanja modal sesuai dengan persentase investasi Partisipan berdasarkan audit investasi tahun sebelumnya.
- Partisipan berhak untuk menerima dana penyusutan dan pembagian laba berdasarkan hasil audit investasi yang berlaku.

Pada tanggal 20 September 2023, auditor independen telah selesai melakukan audit dan menerbitkan laporan audit investasi untuk tahun 2022 di mana Partisipan menyetujui sisa hasil investasi untuk tahun 2022 sebesar USD5,16 juta atau setara dengan Rp79,54 miliar untuk Perusahaan dan USD3,76 juta atau setara dengan Rp58,02 miliar untuk HPI. Laporan audit investasi juga menyimpulkan proporsi investasi Partisipan untuk tahun 2022 adalah 54,91% untuk Perusahaan dan 45,09% untuk HPI.

Pada tanggal 5 Juni 2023, Partisipan menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investasi atas perhitungan dana depresiasi aset tetap yang dimiliki Partisipan dan sisa laba berdasarkan proporsi investasi Partisipan sehubungan dengan distribusi laba KSO TPK Koja tahun 2023.

49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

d) The Master Agreement of Kerja sama Operasi Terminal Petikemas Koja between the Company and HPI (continued)

The principal financial aspects of this Agreement including its amendments are as follows: (continued)

- *The Participants are entitled to reimburse depreciation funds from fixed assets owned by the respective Participants used in operation and shall receive profit based on the investments made by the Participants.*
- *Profit distributable to the Participants is determined by deducting operating expenses, royalties, bank administration charges and depreciation funds from revenue.*
- *Royalties will be paid to the Company if the annual container throughput exceeds the minimum annual target.*
- *If there are new capital expenditures, both parties agreed to finance the capital expenditures in accordance with the investment percentages of the Participants based on the prior year investment audit.*
- *The Participants have the right to receive depreciation funds and distribution of profit based on prevailing investment audit result.*

On September 20, 2023, the independent auditors completed and released the investment audit report for the year 2022 whereby the Participants approved the outstanding return of investment for the year 2022 of USD5.16 million or equivalent to Rp79.54 billion for the Company and USD3.76 million or equivalent to Rp58.02 billion for HPI. The investment audit report also concluded that the investment proportions of the Participants for the year 2022 are 54.91% for the Company and 45.09% for HPI.

On June 5, 2023, the Participants appointed independent auditors to perform an investment audit for the calculation of depreciation funds of assets owned by the Participants and the remaining net income on the basis of share of investment of the Participants in relation to the distribution of KSO TPK Koja's 2023 net income.

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

d) Perjanjian Induk Kerja sama Operasi Terminal Petikemas Koja antara Perusahaan dan HPI (lanjutan)

Pada tanggal 13 Juni 2024, auditor independen telah selesai melakukan audit dan menerbitkan laporan audit investasi untuk tahun 2023 di mana Partisipan menyetujui sisa hasil investasi untuk tahun 2023 sebesar USD5,91 juta atau setara dengan Rp92,64 miliar untuk Perusahaan dan USD4,12 juta atau setara dengan Rp64,71 miliar untuk HPI. Laporan audit investasi juga menyimpulkan proporsi investasi Partisipan untuk tahun 2023 adalah 54,91% untuk Perusahaan dan 45,09% untuk HPI.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama tanggal 6 Desember 2024, Perusahaan dan HPI sepakat untuk membagikan sebagian laba bersih KSO TPK Koja sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024 sebesar Rp109,82 miliar atau setara dengan USD6,79 juta untuk Perusahaan dan Rp90,18 miliar atau setara dengan USD5,58 juta untuk HPI.

Pada tanggal 5 Agustus 2014, Perusahaan dan HPI mengadakan Revisi atas Perjanjian Kerja sama untuk Pengelolaan Terminal Petikemas III Tanjung Priok (Revisi Perjanjian) dimana Perusahaan dan HPI sepakat untuk memperpanjang kerja sama pengoperasian Terminal Petikemas III Tanjung Priok sampai dengan tanggal 26 Maret 2039.

Revisi Perjanjian ini berlaku efektif pada saat syarat pendahuluan yang terakhir telah dipenuhi. Sehubungan dengan Revisi Perjanjian tersebut, TPK Koja akan membayar biaya sewa kuartalan kepada Perusahaan sebesar USD8.750.000, sedangkan royalti tidak lagi dibayarkan oleh TPK Koja kepada Perusahaan. Berdasarkan Revisi Perjanjian, biaya sewa kuartalan dapat disesuaikan pada setiap tanggal peninjauan pembayaran sewa, yaitu 1 Januari pada setiap tahun berikutnya.

Pada tanggal 22 Juni 2015, Perusahaan dan HPI telah melakukan perubahan terhadap Revisi Perjanjian di atas dimana pada akhir masa perjanjian, seluruh aset yang dimiliki HPI dan bagian HPI dalam aset bersama serta pekerjaan modal akan dialihkan kepada Perusahaan tanpa adanya pembebanan.

49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

d) The Master Agreement of Kerja sama Operasi Terminal Petikemas Koja between the Company and HPI (continued)

On June 13, 2024, the independent auditors completed and released the investment audit report for the year 2023 whereby the Participants approved the outstanding return of investment for the year 2023 of USD5.91 million or equivalent to Rp92.64 billion for the Company and USD4.12 million or equivalent to Rp64.71 billion for HPI. The investment audit report also concluded that the investment proportions of the Participants for the year 2023 are 54.91% for the Company and 45.09% for HPI.

Based on Decision Letter dated December 6, 2024, the Company and HPI agreed to partially distributes net income of KSO TPK Koja as of October 31, 2024 amounting to Rp109.82 billion or equivalent to USD6.79 million for the Company and Rp90.18 billion or equivalent to USD5.58 million for HPI.

On August 5, 2014, the Company and HPI entered into a Revised Cooperation Agreement for the Management of Tanjung Priok Container Terminal III (Revised Agreement), whereby the Company and HPI agreed to extend the cooperation for operating Terminal Petikemas III Tanjung Priok until March 26, 2039.

The Revised Agreement will commence on the date of the fulfilment of the last condition precedent. In consideration to the Revised Agreement, TPK Koja will have to pay quarterly rent fee amounting to USD8,750,000 to the Company, while royalty will no longer be paid by TPK Koja to the Company. Based on the Revised Agreement, the quarterly rent may be adjusted at the date of rent payment evaluation, which is January 1 of each of the following years.

On June 22, 2015, the Company and HPI has amended the Revised Agreement mentioned above where at the end of the agreement period, all of the HPI's assets and HPI's interest in the joint assets and the capital works will be transferred to the Company free of encumbrances.

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

d) Perjanjian Induk Kerja sama Operasi Terminal Petikemas Koja antara Perusahaan dan HPI (lanjutan)

Sehubungan dengan Revisi Perjanjian tersebut, KSO TPK Koja akan membayar biaya sewa kuartalan kepada Perusahaan sebesar USD8.750.000, sedangkan royalti tidak lagi dibayarkan oleh KSO TPK Koja kepada Perusahaan.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Perusahaan telah mencatat pendapatan atas sewa kuartalan tersebut masing-masing sebesar USD36.536.373 (setara dengan Rp601,16 miliar) dan USD36.493.017 (setara dengan Rp575,18 miliar).

Dalam Revisi Perjanjian tersebut, Perusahaan berhak memperoleh pembayaran premium sebesar USD50.000.000 dari HPI sehubungan dengan dilanjutkannya kerja sama antara Perusahaan dan HPI untuk pengelolaan TPK Koja. Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Perusahaan telah mencatat pendapatan yang berasal dari amortisasi premium masing-masing sebesar Rp27.735.417. Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, saldo yang belum diamortisasi atas premium tersebut masing-masing sebesar Rp402.163.542 dan Rp429.898.958 dan dicatat sebagai bagian dari akun pendapatan diterima di muka pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

e) Perjanjian Pemberian Kuasa Pengoperasian dan Pemeliharaan - JICT

Pada tanggal 27 Maret 1999, Perusahaan dan JICT mengadakan Perjanjian Pemberian Kuasa Pengoperasian dan Pemeliharaan Terminal Petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok ("Perjanjian Pemberian Kuasa") dimana Perusahaan menunjuk dan memberikan kuasa pada JICT untuk pengoperasian dan pemeliharaan properti yang telah dikuasakan (mencakup terminal kontainer, fasilitas pendukung terminal kontainer dan utilitas) sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian. Periode perjanjian adalah 20 (dua puluh) tahun sejak 27 Maret 1999, kecuali diakhiri sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.

49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

d) The Master Agreement of Kerja sama Operasi Terminal Petikemas Koja between the Company and HPI (continued)

In consideration to the Revised Agreement, KSO TPK Koja will have to pay quarterly rent fee to the Company amounting to USD8,750,000 million, while royalty will no longer be paid by KSO TPK Koja to the Company.

For the years ended December 31, 2025 and 2024, the Company has recorded revenue from these quarterly rentals of USD36,536,373 (equivalent to Rp601.16 billion) and USD36,493,017 (equivalent to Rp575.18 billion) respectively.

In the Revised Agreement, the Company has the right to obtain payment of premium amounting to USD50,000,000 from HPI in relation to the continuing cooperation between the Company and HPI for the management of TPK Koja. For the year ended December 31, 2025 and 2024, the Company has recorded revenue from amortisation of premium amounting to Rp27,735,417. As of December 31, 2025 and 2024, the balance of unamortized premium amounted to Rp402,163,542 and Rp429,898,958 respectively, and was recorded as part of unearned revenue account in the consolidated statements of financial position.

e) Authorization Agreement for the Operation and Maintenance - JICT

On March 27, 1999, the Company and JICT entered into Authorization Agreement for The Operation and Maintenance of Container Terminal in Tanjung Priok Seaport ("Authorization Agreement") whereby the Company appointed and confered authorization on JICT for the operation and maintenance of the authorization property (including container terminal, container terminal support facilities and utilities) as defined in the agreement. The authorization period is 20 (twenty) years from March 27, 1999, unless terminated earlier in accordance with the provisions of the agreement.

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

e) Perjanjian Pemberian Kuasa Pengoperasian dan Pemeliharaan - JICT (lanjutan)

Sehubungan dengan pemberian kuasa kepada JICT tersebut, JICT akan membayar royalti kepada Perusahaan sebesar 10% dari pendapatan kotor terminal kontainer secara bulanan. Disamping itu, JICT juga akan membayar kepada Perusahaan atas sewa peralatan dan tenaga kerja yang ditempatkan Perusahaan di JICT.

Pada tanggal 5 Agustus 2014, Perusahaan dan JICT mengadakan Amendemen Perjanjian Pemberian Kuasa - Jakarta International Container Terminal, Pelabuhan Tanjung Priok (Amendemen Perjanjian Pemberian Kuasa) dimana Perusahaan dan JICT sepakat untuk memperpanjang Perjanjian Pemberian Kuasa sampai dengan tanggal 26 Maret 2039. Amendemen Perjanjian Pemberian Kuasa ini berlaku efektif pada saat syarat pendahuluan yang terakhir telah dipenuhi.

Sehubungan dengan Amendemen Perjanjian Pemberian Kuasa tersebut, JICT akan membayar biaya sewa kuartalan kepada Perusahaan sebesar USD21.250.000 (Catatan 49f), sedangkan royalti, sewa peralatan berupa 4 (empat) RTGC dan penempatan tenaga kerja tidak lagi dibayarkan oleh JICT kepada Perusahaan. Perjanjian jasa dan teknis "*know-how*" yang terdapat pada Perjanjian Pemberian Kuasa akan diakhiri. Berdasarkan Amendemen Perjanjian Pemberian Kuasa tersebut, kegiatan usaha dan aset Terminal 2 akan dialihkan dari JICT kepada Perusahaan (Catatan 49i).

Berdasarkan Amendemen Perjanjian Pemberian Kuasa tersebut, Perusahaan akan menerima pembayaran premium sebesar USD200.000.000 dari HPJ (Catatan 49h).

49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

e) Authorization Agreement for the Operation and Maintenance - JICT (continued)

In consideration of the granting of the authorization to JICT, JICT will pay monthly royalties to the Company calculated at 10% of the preceding month container terminal gross revenue. Moreover, JICT will also pay to the Company for equipment rental and Company's employee secondment in JICT.

On August 5, 2014, the Company and JICT entered into an Amendment Authorization Agreement - Jakarta International Container Terminal, Port of Tanjung Priok (Amended Authorization Agreement), whereby the Company and JICT agreed to extend the Authorization Agreement until March 26, 2039. The Amended Authorization Agreement will commence on the date of the fulfilment of the last condition precedent.

In consideration to the Amendment Authorization Agreement, JICT will have to pay quarterly rent to the Company fee amounting to USD21,250,000 (Note 49f), while royalty, equipment rental of 4 (four) RTGCs and secondment of employee will no longer be paid by JICT to the Company. As for the technical "know-how" and services agreement in Authorization Agreement, they will be terminated. Based on the Amended Authorization Agreement, Terminal 2 assets and business will be transferred from JICT to the Company (Note 49i).

Based on the Amendment Authorization Agreement, the Company will receive payment of premium from HPJ amounting to USD200,000,000 (Note 49h).

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

e) Perjanjian Pemberian Kuasa Pengoperasian dan Pemeliharaan - JICT (lanjutan)

Pada tanggal 22 Juni 2015, Perusahaan dan JICT mengadakan Perjanjian Perubahan terhadap Amendemen Perjanjian Pemberian Kuasa dimana jumlah premium yang dibayarkan oleh HPJ kepada Perusahaan diubah menjadi sebesar USD215.000.000. Amendemen Perjanjian Pemberian Kuasa ini perlu dilakukan penyesuaian agar sesuai dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana diatur dalam surat Menteri BUMN dan surat Menteri Perhubungan di bawah.

Pada tanggal 9 Juni 2015, Perusahaan menerima surat dari Menteri BUMN tentang Kerja sama Pengelolaan/Pengoperasian JICT dan TPK Koja dimana Menteri BUMN secara prinsip menyetujui rencana kerja sama usaha pengelolaan/pengoperasian JICT dan TPK Koja, dengan kepemilikan minimal di JICT sebesar 51%, dengan persyaratan sebagai berikut:

- Memperhatikan surat Menteri Perhubungan No. HK.201/3/4 Phb 2014 tanggal 18 September 2014, terkait dengan pemisahan fungsi operator dan regulator sesuai UU No. 17 Tahun 2008.

- Melaksanakan surat Wakil Menteri BUMN kepada Direktur Utama BUMN No. S-645/MBU/WK/10/2014 tanggal 9 Oktober 2014 hal penyampaian Hasil Panja Aset BUMN dan Putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya terkait kerja sama BUMN.

Pada tanggal 30 September 2021, Perusahaan dan HPJ telah menandatangani Pokok-Pokok Perjanjian menyepakati ketentuan-ketentuan utama yang diusulkan untuk diatur lebih lanjut dalam perjanjian - perjanjian perubahan terhadap amendemen perjanjian perpanjangan JICT saat ini dan dokumen-dokumen turunan yang relevan dari perjanjian perpanjangan JICT saat ini.

49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

e) Authorization Agreement for the Operation and Maintenance - JICT (continued)

On June 22, 2015, the Company and JICT entered into Amendment Agreement to the Amended Authorization Agreement which changed the amount of premium to be paid by HPJ to the Company amounting to USD215,000,000. The Amended Authorization Agreement needs to have adjustments to be in accordance with Law No. 17 Year 2008 of Shipping as regulated in the letter of the Minister of SOEs and letter of the Minister of Transportation below.

On June 9, 2015, the Company received a letter from the Minister of SOE regarding Cooperation of Management/ Operation of JICT and TPK Koja whereas the Minister of SOEs principally agrees with the plan of cooperation of JICT and TPK Koja management/operation, with minimum percentage of ownership of 51%, with requirements as follows:

- *To comply with the letter from Minister of Transportation No. HK.201/3/4 Phb 2014 dated September 18, 2014, related to the separation of operator and regulator functions in accordance with UU No. 17 Year 2008.*
- *To execute letter of Vice Minister of SOE Enterprise to President Director of SOE No. S-645/MBU/WK/10/2014 dated October 9, 2014 regarding result of Assets Working Committee of SOE and Decision of Constitutional Court, especially related to SOE cooperation.*

On September 30, 2021, the Company and HPJ have entered into the Heads of Agreement pursuant to which have agreed on the proposed key terms to be further stipulated in amendment of agreements to the existing extension agreements of JICT and the relevant derivatives documents to the existing extension agreements of JICT.

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

e) Perjanjian Pemberian Kuasa Pengoperasian dan Pemeliharaan - JICT (lanjutan)

Pada tanggal 30 Maret 2022, Perusahaan dan JICT telah menandatangani Amendemen terhadap Amendemen Perjanjian Pemberian Kuasa, diantaranya mengatur pengalihan aset Terminal 2 dimana pada tanggal pengalihan, kepemilikan dan penguasaan aset Terminal 2 akan dialihkan dari JICT ke Perusahaan sesuai dengan Akta Pengalihan. Berdasarkan amendemen tersebut, nilai aset Terminal 2 akan didasarkan pada nilai barang sisa *(scrap value)* sebagaimana ditentukan oleh penilai independen yang ditunjuk oleh Perusahaan.

f) Perjanjian Penggunaan Tanah HPL, Bangunan Fasilitas Pelabuhan dan Fasilitas Penunjang Terminal Petikemas lainnya - JICT

Pada tanggal 27 Maret 1999, Perusahaan dan JICT mengadakan Perjanjian Penggunaan Tanah HPL, Bangunan Fasilitas Pelabuhan dan Fasilitas Penunjang Terminal Petikemas ("Perjanjian Penggunaan") dimana Perusahaan mengizinkan dan memberikan hak kepada JICT untuk menggunakan dan menyewa properti berikut dengan semua perbaikan yang telah dilakukan oleh JICT sejak tanggal efektif Perjanjian Pemanfaatan.

Atas pemberian hak Penggunaan oleh Perusahaan, JICT setuju untuk membayar biaya bulanan yang ditetapkan dalam Perjanjian tersebut, dihitung sebesar 5% dari pendapatan kotor.

Berdasarkan amendemen Perjanjian Pemanfaatan - Jakarta International Container Terminal, Pelabuhan Tanjung Priok tanggal 5 Agustus 2014 (sebagaimana telah diubah), ditandatangani pada tanggal 30 Maret 2022, Perusahaan dan JICT, antara lain menyetujui JICT atas biaya sendiri, wajib membayar dan melunasi PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).

49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

e) Authorization Agreement for the Operation and Maintenance - JICT (continued)

On March 30, 2022, the Company and JICT have entered into Amendment to the Amended Authorization Agreement, among others stipulated the transfer of Terminal 2 Assets in which at the date of transfer, the ownerships and the authority of Terminal 2 assets will be transferred from JICT to the Company in accordance with the Deed of Transfer. Based on the amendment, the value of Terminal 2 assets will be based on scrap value as determined by the independent appraisal appointed by the Company.

f) Utilization Agreement of Land Under HPL Owned by the Company, Port Facilities Building and Other Container Port Supporting Facilities - JICT

On March 27, 1999, the Company and JICT entered into an Agreement on Utilization of The HPL Land, Port Buildings Facility, and The Container Terminal Support Facility ("Utilization Agreement") whereby the Company granted and conferred the right to utilise and rent to JICT the properties together with all improvements held by JICT commencing from the effective date of the Utilization Agreement.

In consideration of the granting of the utilization right by the Company, JICT agreed to pay a monthly fee defined in these Agreement, calculated at 5% of gross revenue.

Based on amendment agreement to Utilisation Agreement - Jakarta International Container Terminal, Port of Tanjung Priok dated August 5, 2014 (as amended), signed on March 30, 2022, the Company and JICT, agreed to, among others, JICT at its owned expense, shall duly pay and discharge PBB (Tax on Land and Building).

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

f) Perjanjian Penggunaan Tanah HPL, Bangunan Fasilitas Pelabuhan dan Fasilitas Penunjang Terminal Petikemas lainnya - JICT (lanjutan)

Perusahaan tetap memiliki hak kepemilikan properti tersebut. Jangka waktu perjanjian adalah 20 (dua puluh tahun) dari 27 Maret 1999, kecuali diakhiri sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.

Pada tanggal 5 Agustus 2014, Perusahaan dan JICT mengadakan Amendemen Perjanjian Penggunaan dimana Perusahaan dan JICT sepakat untuk memperpanjang Perjanjian Penggunaan sampai dengan tanggal berakhirnya Amendemen Perjanjian Pemberian Kuasa. Amendemen Perjanjian Penggunaan ini berlaku efektif pada saat syarat pendahuluan yang terakhir telah dipenuhi. Sehubungan dengan Amendemen Perjanjian Penggunaan tersebut dan sebagaimana diatur dalam Amendemen Perjanjian Pemberian Kuasa (Catatan 49e), JICT akan membayar biaya sewa kuartalan kepada Perusahaan sebesar USD21.250.000 sedangkan kompensasi 5% dari pendapatan kotor JICT tidak lagi dibayarkan oleh JICT kepada Perusahaan.

Pada tanggal 30 Maret 2022, Perusahaan dan JICT telah menandatangani Amendemen Perjanjian Penggunaan, diantaranya mengatur mengenai kewajiban pembayaran PBB, kewajiban-kewajiban JICT dan biaya pemeliharaan.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Perusahaan telah mencatat pendapatan atas sewa kuartalan tersebut masing-masing sebesar USD85.000.000 (setara dengan Rp1.383.991.250 dan USD85.000.000 (setara dengan Rp1.336.178.750).

49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

f) Utilization Agreement of Land Under HPL Owned by the Company, Port Facilities Building and Other Container Port Supporting Facilities - JICT (continued)

The Company retained the rights of the properties ownership. The utilization period is 20 (twenty years) from March 27, 1999, unless terminated earlier in accordance with the provisions of the agreement.

On August 5, 2014, the Company and JICT entered into an Amended Utilization Agreement whereby the Company and JICT agreed to extend the Utilization Agreement until the date of termination of Amended Authorization Agreement. The Amended Utilization Agreement will commence on the date of the fulfilment of the last condition precedent. In consideration to the Amended Utilization Agreement and as regulated in the Amendment Authorization Agreement (Note 49e), JICT will have to pay quarterly rent fee to the Company amounting to USD21,250,000 while compensation of 5% of JICT's gross revenue will no longer be paid by JICT to the Company.

On March 30, 2022, the Company and JICT have entered into Amendment to the Utilization Agreement, among others stipulated the obligation of PBB payment, JICT's obligations and maintenance expenses.

For the year ended December 31, 2025 and 2024 the Company has recorded revenue from quarterly rent fee amounting to USD85,000,000 (equivalent to Rp1,383,991,250 and USD85,000,000 (equivalent to Rp1,336,178,750) respectively.

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

g) Amendemen Perjanjian Pemegang Saham - JICT

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa JICT tanggal 24 November 2015, para pemegang saham JICT setuju antara lain:

- Bergantung pada persetujuan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), untuk meningkatkan modal dasar JICT dari Rp221.450.406 yang terbagi atas 1 (satu) lembar saham Seri A dan 442.900.812 lembar saham Seri B dengan nilai nominal per saham masing-masing Rp500 (nilai penuh) menjadi Rp230.489.198 yang terbagi atas 1 (satu) lembar saham Seri A dan 460.978.396 lembar saham Seri B dengan nilai nominal per saham masing-masing Rp500 (nilai penuh).
- Bergantung pada persetujuan BKPM, untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh JICT dari Rp221.450.406 yang terbagi atas 442.900.812 lembar saham Seri B dengan nilai nominal per saham Rp500 (nilai penuh) menjadi Rp230.489.198 yang terbagi atas 460.978.396 lembar saham Seri B dengan nilai nominal per saham Rp500 (nilai penuh).

Pada tanggal 7 Desember 2015, BKPM telah menyetujui perubahan modal JICT tersebut di atas.

Pada tanggal 30 Maret 2022, Perusahaan, HPJ, Kopegmar dan JICT telah menandatangani Amendemen terhadap Amendemen Perjanjian Pemegang Saham, diantaranya mengatur pengalihan saham JICT yang dimiliki HPJ kepada Perusahaan sebanyak 9.300.917 saham dengan harga pembelian sebesar USD1. Dengan demikian, kepemilikan Perusahaan di JICT menjadi 51,00% dari sebelumnya 48,90%.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas JICT No. 11 tanggal 30 Mei 2022, para pemegang saham telah menyetujui pengalihan saham tersebut di atas serta perubahan anggaran dasar JICT. Akta tersebut telah diberitahukan dan disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 31 Mei 2022.

49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

g) Amended Shareholders Agreement - JICT

Based on the Circular Resolution of Shareholders in Lieu of An Extraordinary General Meeting of Shareholders of JICT dated November 24, 2015, the shareholders of JICT agreed among others:

- *Subject to approval from the Capital Investment Coordinating Board (BKPM), to increase JICT's authorized capital from Rp221,450,406 divided into 1 (one) A Series share and 442,900,812 B Series shares with each share having the nominal value of Rp500 (full amount) to become Rp230,489,198 divided into 1 (one) A Series share and 460,978,396 B Series shares with each share having the nominal value of Rp500 (full amount).*
- *Subject to approval from BKPM, to increase JICT's issued and paid-up capital from Rp221,450,406 divided into 442,900,812 B Series shares with each share having the nominal value of Rp500 (full amount) to become Rp230,489,198 divided into 460,978,396 B Series shares with each share having the nominal value of Rp500 (full amount).*

On December 7, 2015, BKPM has already approved the above mentioned JICT's capital changes.

On March 30, 2022, the Company, HPJ, Kopegmar and JICT have entered into Amendment to the Amended Shareholder Agreement, among others stipulated the transfer of JICT shares owned by HPJ to the Company amounting to 9,300,917 shares with purchase price of USD1. Therefore, the ownerships of the Company in JICT became 51.00% from previously 48.90%.

Based on Deed of Decision of General Meeting of Shareholder of JICT No. 11 dated May 30, 2022, the shareholders agreed to such transfer of shares as mentioned above and amendmend of the JICT's article of association. The Deed has been notified to and approved by the Ministry of Law and Human Rights dated May 31, 2022.

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

h) Perjanjian Pembayaran Premium - JICT

Pada tanggal 5 Agustus 2014, Perusahaan dan HPJ mengadakan Perjanjian Pembayaran Premium dimana HPJ sepakat untuk melakukan pembayaran premium kepada Perusahaan sebesar USD200.000.000 sebagai imbalan atas tetap dilanjutkannya kerja sama usaha patungan Perusahaan dengan HPJ. Perjanjian ini berlaku efektif pada saat setiap dari persyaratan pendahuluan pada Amendemen Perjanjian Pemberian Kuasa telah dipenuhi (Catatan 49e). Pada tanggal 22 Juni 2015, Perusahaan dan HPJ mengadakan Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian Pembayaran Premium dimana jumlah premium yang dibayarkan oleh HPJ diubah menjadi sebesar USD215.000.000. Dalam keadaan tertentu dimana terjadinya pengakhiran secara lebih awal atas Amendemen Perjanjian Pemberian Kuasa, maka premium harus dibayarkan kembali oleh Perusahaan kepada HPJ secara pro-rata. Pada tanggal 2 Juli 2015, Perusahaan telah menerima pembayaran premium tersebut.

Pada tanggal 30 Maret 2022, Perusahaan dan HPJ sepakat mengenai tambahan premium sebesar USD17.940.000 yang harus dibayarkan oleh HPJ kepada Perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) *Milestone* pertama sebesar USD8.940.000 pada saat penandatanganan amendemen-amendemen tersebut di atas.
2) *Milestone* kedua sebesar USD9.000.000 setelah yang lebih awal terjadi antara: (i) merger yang disepakati dan pengalihan saham yang diusulkan menjadi efektif secara hukum dan pengalihan atas aset Terminal 2 telah seluruhnya selesai; atau (ii) 10 tahun setelah penandatanganan amendemen-amendemen tersebut.

Perusahaan telah menerima pembayaran premium *milestone* pertama sebesar USD8.940.000 pada bulan April 2022 yang diamortisasi selama sisa masa Amendemen Perjanjian Pemberian Kuasa, yaitu sampai dengan 2039.

49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

h) Premium Payment Agreement - JICT

On August 5, 2014, the Company and HPJ entered into a Premium Payment Agreement, whereby HPJ agreed to pay premium to the Company amounting to USD200,000,000 as consideration for continuing the joint venture of the Company with HPJ. The Premium Payment Agreement will commence on the date on each of the condition precedent in the Authorization Agreement has been satisfied (Note 49e). On June 22, 2015, the Company and HPJ entered into Amendment Agreement to Premium Payment Agreement in which the amount of premium to be paid by HPJ was amended to USD215,000,000. In certain circumstances leading to early termination of the Amended Authorization Agreement, the premium shall be repaid by the Company to HPJ using a pro-rate basis. On July 2, 2015, the Company has received payment of the premium.

On March 30, 2022, the Company and HPJ agreed on additional premium of USD17,940,000 which should be paid by HPJ to the Company with terms as follows:

1) First milestone of USD8,940,000 at the signing of the above amendments.

2) Second milestone of USD9,000,000 after the earlier one occurs between: (i) the agreed merger and proposed share transfer become legally effective and the transfer of Terminal 2 assets is fully completed; or (ii) 10 years after the signing of the amendments.

The Company has received the first milestone premium payment of USD8,940,000 on April 2022 which is amortized over the remaining period of the Amendment of Authorization Agreement, which is until 2039.

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

h) Perjanjian Pembayaran Premium - JICT (lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Perusahaan telah mencatat pendapatan yang berasal dari amortisasi premium masing-masing sebesar Rp126.458.992. Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, saldo yang belum di amortisasi atas premium tersebut masing-masing sebesar Rp1.713.193.638 dan Rp1.839.652.629, dan dicatat sebagai bagian dari akun liabilitas kontrak pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

i) Perjanjian Pengalihan Aset - JICT

Pada tanggal 14 Desember 2015, Perusahaan dan JICT mengadakan Perjanjian Pengalihan Aset Terminal 2 dari JICT kepada Perusahaan dimana Perusahaan dan JICT sepakat untuk melakukan pengalihan aset-aset milik JICT yang terdapat di Terminal 2 kepada Perusahaan pada tanggal perjanjian ini. Atas pengalihan aset-aset tersebut, Perusahaan diharuskan melakukan pembayaran sebesar USD2.816.526, yang akan dibayarkan kepada JICT menggunakan mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia tanggal 30 November 2015, yaitu sebesar Rp38.980.720.

Pada tanggal 30 Mei 2022, Perusahaan dan JICT telah menandatangani Amendemen Perjanjian Pengalihan Aset, diantaranya disepakati bahwa Aset Terminal 2 belum dapat dialihkan secara fisik oleh JICT kepada Perusahaan berdasarkan Akta Pengalihan Aset tanggal 14 Desember 2015 tersebut di atas karena Perusahaan belum melakukan pembayaran sebagaimana dipersyaratkan dalam Akta Pengalihan tersebut. Juga disepakati bahwa pengalihan aset Terminal 2 akan didasarkan pada *scrap value* sebesar Rp20,23 miliar sebagaimana ditentukan oleh penilai independen. Perusahaan telah melakukan pembayaran atas pengalihan aset Terminal 2 tersebut kepada JICT di tanggal 24 Juni 2022.

49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

h) Premium Payment Agreement - JICT (continued)

For the year ended December 31, 2025 and 2024, the Company has recorded revenue from amortisation of premium amounting to Rp126,458,992, respectively. As of December 31, 2025 and 2024, the balance of unamortized premium amounted to Rp1,713,193,638 and Rp1,839,652,629, respectively, and was recorded as part of contract liabilities account in the consolidated statements of financial position.

i) Assets Transfer Agreement - JICT

On December 14, 2015, the Company and JICT entered into Terminal 2 Assets Transfer from JICT to the Company Agreement where the Company and JICT agreed to transfer assets owned by JICT at Terminal 2 to the Company on the date of this agreement. For the transfer of the assets, the Company is obliged to make payment amounting to USD2,816,526, which will be paid to JICT in Rupiah using Bank Indonesia middle rate as of November 30, 2015, amounted to Rp38,980,720.

On May 30, 2022, the Company and JICT have entered into Amendment to Asset Transfer Agreement, among others agreed that the transfer of Terminal 2 Assets can not be transferred physically from JICT to the Company based on the Assets Transfer Agreement dated December 14, 2015 as mentioned above because the Company has not paid as required in the Asset Transfer Agreement. It is also agreed that the transfer of Terminal 2 assets will be based on scrap value of Rp20.23 billion as determined by the independent appraisal. The Company has paid the Terminal 2 asset transfer to JICT on June 24, 2022.

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

j) Perjanjian Pemegang Saham IPC TPK dan STMS

Pada tanggal 19 April 2014, IPC TPK dan Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd., Singapura ("STMS") menandatangani Perjanjian Pemegang Saham untuk Terminal Petikemas 1 dan Perjanjian Perubahannya pada tanggal 11 September 2014 dimana IPC TPK dan STMS akan mendirikan perusahaan dengan jumlah saham sebesar 1.000 saham yang terbagi menjadi 510 saham seri A yang dimiliki IPC TPK dan 490 saham seri B yang dimiliki STMS.

Perusahaan tersebut didirikan untuk menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Perjanjian Pembangunan dan Pengoperasian sehubungan dengan pembangunan dan pengoperasian Terminal Petikemas 1 dan kegiatan lain sesuai dengan hukum yang berlaku sebagaimana disetujui oleh IPC TPK dan STMS.

Jika dalam suatu tahun buku, Perusahaan tersebut memiliki laba yang tersedia untuk didistribusikan maka distribusi akan dilakukan pertama untuk STMS hingga pengembalian modal yang diperbolehkan telah tercapai sebesar 16% dan kedua dibagikan secara proporsional kepada STMS dan IPC TPK sesuai dengan kepemilikan saham masing-masing (Catatan 49k). Syarat dan ketentuan lainnya diatur dalam perjanjian.

Kepemilikan saham IPC TPK pada perusahaan yang didirikan tidak diikuti dengan pengendalian dan karenanya laporan keuangan perusahaan tersebut tidak dikonsolidasi ke dalam laporan keuangan IPC TPK.

Perusahaan yang didirikan sehubungan dengan perjanjian tersebut di atas bernama PT New Priok Container Terminal One berdasarkan Akta No. 33 tanggal 28 Mei 2014.

49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

j) Shareholders Agreement IPC TPK and STMS

On April 19, 2014, IPC TPK and Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd., Singapore ("STMS") signed a Shareholders Agreement for Container Terminal 1 and the Amendment Agreement on September 11, 2014, wherein IPC TPK and STMS will establish a company with total shares amounting to 1,000 shares comprising of 510 series A Shares held by IPC TPK and 490 series B Shares held by STMS.

The company was set up to operate based on the Construction and Operation Agreement in connection with the operation and development of Container Terminal 1 and other activities in accordance with applicable law as agreed by IPC TPK and STMS.

If, in respect of any financial year, the Company has profit available for distribution then distribution will be made first for STMS until permitted equity return has been achieved 16% and secondly distributed proportionally to STMS and IPC TPK in accordance with their respective ownerships (Note 49k). Other term and conditions are stipulated in the agreement.

IPC TPK's ownership in the company established is not followed by control and therefore, the company's financial statements are not consolidated in the IPC TPK's financial statements.

The company established in relation to the above agreement namely PT New Priok Container Terminal One based on Deed No. 33 dated May 28, 2014.

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

k) Perjanjian Pinjaman - Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd., Singapura

Pada tanggal 19 April 2014, IPC TPK dan STMS menandatangani Perjanjian Pinjaman dimana STMS memberikan fasilitas pinjaman kepada IPC TPK untuk kepentingan pembayaran Saham Seri A pada NPCT1 sebesar USD15.096.000 dengan tingkat bunga tahunan 7%.

Fasilitas tersebut akan dibayarkan kembali melalui pengurangan modal pada NPCT1, dengan IPC TPK dan STMS sebagai pemegang sahamnya, dan dari dividen yang dapat dibagikan kepada IPC TPK (Catatan 49j). Seluruh bunga akan dibayarkan dari dividen IPC TPK.

Pada tanggal 11 September 2014, IPC TPK dan STMS menandatangani Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian Pinjaman tertanggal 19 April 2014 untuk mengatur mengenai dilakukannya pembebanan bunga setiap tahun.

Pada tanggal 10 November 2016, IPC TPK dan STMS menandatangani kesepakatan untuk merevisi tingkat bunga periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2018 menjadi 0%.

Pada tanggal 31 Desember 2018, IPC TPK dan STMS menandatangani kesepakatan untuk memperpanjang revisi tingkat bunga periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2020 menjadi 0%, lalu pada tanggal 31 Desember 2020, IPC TPK dan STMS kembali menandatangani kesepakatan untuk memperpanjang pengenaan bunga 0% untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2022. Kemudian, pada tanggal 1 Januari 2023, IPC TPK dan STMS kembali menandatangani kesepakatan untuk memperpanjang pengenaan bunga 0% untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2025.

49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

k) Loan Agreement - Sea Terminal Management & Services Pte. Ltd., Singapore

On April 19, 2014, IPC TPK and STMS signed a Loan Agreement where STMS provides loan facilities to IPC TPK for the purpose of A Series Shares payments in NPCT1 amounting to USD15,096,000 with annual interest rate of 7%.

The facility will be repaid through reduction of capital in NPCT1, with IPC TPK and STMS as shareholders, and from dividends which can be distributed to IPC TPK (Note 49j). All interest will be paid from IPC TPK dividends.

On September 11, 2014, IPC TPK and STMS signed the Agreement Amendments to the Loan Agreement dated April 19, 2014 regarding interests that was to be charged per annum.

On November 10, 2016, IPC TPK and STMS signed an agreement to revise interest rate for period from January 1, 2016 to December 31, 2018 to become 0%.

As of December 31, 2018, IPC TPK and STMS signed an agreement to revise interest rate for period from January 1, 2019 to December 31, 2020 to become 0%, then on December 31, 2020, IPC TPK and STMS re-signed the agreement to prolong the 0% interest period from January 1, 2021 to December 31, 2022. On January 1, 2023 IPC TPK and STMS re-signed the agreement to extend the 0% interest period from January 1, 2023 to December 31, 2025.

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

l) Perjanjian Penggunaan Tanah - PT Indofood Sukses Makmur Tbk (Indofood)

Pada tanggal 2 Maret 2012, Perusahaan mengadakan perjanjian kerja sama dengan Indofood atas penggunaan bagian tanah Hak Pengelolaan (HPL) milik Perusahaan sesuai Surat Perjanjian No. HK.566/2/18/C.Tpk-12. Perjanjian ini mencakup pengelolaan tanah seluas 329.833 m^2 berlokasi di Jl. Sindang laut dan Jl. Raya Cilincing, Jakarta Utara dan berlaku selama 22 (dua puluh dua) tahun sampai dengan 31 Desember 2033.

Perjanjian kerja sama tersebut telah disetujui oleh Menteri Negara BUMN melalui surat No. S-505/MBU/2011 tanggal 5 Oktober 2011 tentang Persetujuan Optimalisasi Tanah Perusahaan yang digunakan oleh Indofood.

Pendapatan yang diperoleh Perusahaan atas penggunaan lahan tersebut adalah sebesar Rp945.735.153 yang dibayar secara periodik selama 5 (lima) kali pembayaran dan pelunasan pembayaran ke 5 (lima) selambat-lambatnya 36 (tiga puluh enam) bulan setelah perjanjian ditandatangani. Perusahaan juga memperoleh pendapatan tambahan atas pengoperasian dermaga/*jetty* sebesar Rp104.260 per tahun yang dibayarkan setiap awal tahun selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah nota tagihan diterima oleh Indofood.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Perusahaan telah mencatat pendapatan masing-masing sebesar Rp45.486.561. Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, saldo yang belum diamortisasi atas penggunaan bagian tanah HPL masing-masing sebesar Rp363.892.489 dan Rp409.379.050.

m) Perjanjian Pembangunan Dermaga Makassar New Port (MNP) Tahap I

Perusahaan mengadakan Perjanjian Pembangunan Dermaga MNP Tahap IA dengan detail pekerjaan sebagai berikut:

- Perjanjian pekerjaan Paket A mengenai pekerjaan reklamasi dan pembangunan dermaga MNP senilai Rp326.868.365 dengan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk berdasarkan Akta No. 3 dari Grace Dameria Tiorina, S.H., M.Kn., Notaris di Cibubur, tanggal 3 Juni 2015 dengan jangka waktu selama 725 hari kalender sejak perjanjian ditandatangani.

49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

l) Land Usage Agreement - PT Indofood Sukses Makmur Tbk (Indofood)

On March 2, 2012, the Company entered into an agreement with Indofood for the use of a parcel of land under Rights to Manage (HPL) owned by the Company with Agreement No. HK.566/2/18/C.Tpk-12. The Agreement included land management with area of 329,833 m^2 which located at Jl. Sindang Laut and Jl. Raya Cilincing, North Jakarta and is valid for 22 (twenty two) years until December 31, 2033.

The agreement has been approved by the Minister of SOE through the letter No. S-505/MBU/2011 dated October 5, 2011 regarding Approval of Optimalization of the Company's Land which is used by Indofood.

Revenue earned by the Company from the usage of land amounted to Rp945,735,153 and paid periodically for 5 (five) terms, the fifth payment will be settled at the latest 36 (thirty six) months after the agreement was signed. The Company also earned an additional revenue from jetty operations amounting to Rp104,260 annually which will be paid at the latest 7 (seven) work days after the invoice is received by Indofood.

For the year ended December 31, 2025 and 2024, the Company has recorded revenue amounting to Rp45,486,561, respectively. As of December 31, 2025, and 2024, the balance of unamortized use of a parcel of HPL land amounted to Rp363,892,489 and Rp409,379,050, respectively.

m) Construction Agreement of Makassar New Port (MNP) Quay Phase I

The Company entered into a Construction Agreement of MNP Quay Phase IA, with details of work as follows:

- *Agreement of work Package A regarding reclamation and construction of MNP Quay amounted to Rp326,868,365 with PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk based on Deed No. 3 from Grace Dameria Tiorina, S.H., M.Kn., Notary from Cibubur, dated June 3, 2015 with 725 calendar days period since the agreement was signed.*

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

m) Perjanjian Pembangunan Dermaga Makassar New Port (MNP) Tahap I (lanjutan)

Perusahaan mengadakan Perjanjian Pembangunan Dermaga MNP Tahap IA dengan detail pekerjaan sebagai berikut: (lanjutan)

- Perjanjian pekerjaan ini terakhir diubah dengan Addendum III No. 15/HK.301/7/PI.IV-2018 tanggal 12 Juli 2018 menjadi senilai Rp345.785.871 dengan jangka waktu selama 1.227 hari kalender sejak perjanjian ditandatangani.
- Perjanjian pekerjaan Paket B mengenai pekerjaan reklamasi, pengerukan, lapangan kontainer dan *causeway* MNP senilai Rp1.076.779.375 dengan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk - PT Bumi Karsa (KSO) berdasarkan Akta No. 22 dari Ahmad Tauzan Siata, S.H., M.Kn., Notaris di Makassar, tanggal 5 September 2016 dengan jangka waktu selama 830 hari kalender sejak perjanjian ditandatangani.
- Perjanjian pekerjaan ini terakhir diubah dengan Addendum II No. 1/HK.301/3/PI.IV-2019 tanggal 15 Februari 2019 menjadi senilai Rp1.119.939.158 dengan jangka waktu selama 1.022 hari kalender sejak perjanjian ditandatangani.
- Perjanjian pekerjaan Paket C mengenai pekerjaan pembangunan *breakwater* MNP senilai Rp226.725.699 dengan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk - PT Bumi Karsa (KSO) berdasarkan Akta No. 22 dari Ahmad Tauzan Siata, S.H., M.Kn., Notaris di Makassar, tanggal 30 September 2016 dengan jangka waktu selama 600 hari kalender sejak perjanjian ditandatangani.
- Perjanjian pekerjaan ini terakhir diubah dengan Addendum IV No. 3/HK.301/13/PI.IV-2019 tanggal 13 September 2019 dengan jangka waktu menjadi selama 1.160 hari kalender sejak perjanjian ditandatangani.

49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

m) Construction Agreement of Makassar New Port (MNP) Quay Phase I (continued)

The Company entered into a Construction Agreement of MNP Quay Phase IA, with details of work as follows: (continued)

- *This agreement of work was last amended through Addendum III No. 15/HK.301/7/PI.IV-2018 dated July 12, 2018 with changes on the agreement amount into Rp345,785,871 and agreement period into 1,227 calendar days since the agreement was signed.*
- *Agreement of work Package B regarding reclamation of dredging work, container yard, and causeway of MNP amounted to Rp1,076,779,375 with PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk - PT Bumi Karsa (KSO) based on Deed No. 22 from Ahmad Tauzan Siata, S.H., M.Kn., Notary in Makassar, dated September 5, 2016 with period of 830 calendar days since the agreement was signed.*
- *This agreement of work was last amended through Addendum II No. 1/HK. 301/3/PI. IV-2019 dated February 15, 2019 with changes on the agreement amount into Rp1,119,939,158 and agreement period into 1,022 calendar days since from the agreement was signed.*
- *Agreement of work Package C regarding construction work of MNP breakwater amounted to Rp226,725,699 with PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk - PT Bumi Karsa (KSO) based on Deed No. 22 from Ahmad Tauzan Siata, S.H., M.Kn., Notary in Makassar, dated September 30, 2026 with period of 600 calendar days since from the agreement was signed.*
- *This agreement of work was last amended through Addendum IV No. 3/HK.301/13/PI.IV-2019 dated September 13, 2019 with changes on the agreement period into 1,160 calendar days since the agreement was signed.*

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

m) Perjanjian Pembangunan Dermaga Makassar New Port (MNP) Tahap I (lanjutan)

Perusahaan mengadakan Perjanjian Pembangunan Dermaga MNP Tahap IA dengan detail pekerjaan sebagai berikut: (lanjutan)

- Perjanjian pekerjaan Paket D mengenai pekerjaan bangunan fasilitas serta mekanikal dan elektrikal MNP senilai Rp258.089.700 dengan PT Adhi Karya (Persero) Tbk berdasarkan Akta No. 30 dari Ahmad Tauzan Siata, S.H., M.Kn., Notaris di Makassar, tanggal 31 Januari 2018 dengan jangka waktu selama 390 hari kalender sejak perjanjian ditandatangani.

- Perjanjian pekerjaan ini terakhir diubah dengan Addendum V No. 9/HK.301/10/ PI.IV-2020 tanggal 04 September 2020 menjadi senilai Rp283.679.319 dengan jangka waktu selama 1.066 hari kalender sejak perjanjian ditandatangani.

Pada tanggal 24 Agustus 2021, Perusahaan mengadakan perjanjian dengan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut ("LANTAMAL") untuk pembangunan dermaga bagi angkatan laut dan segala biaya yang dikeluarkan oleh Perusahaan akan diperhitungkan dalam konsesi MNP. Pada tanggal 5 Desember 2024, dermaga tersebut sebagian besar telah selesai dibangun dan dilakukan serah terima sementara kepada LANTAMAL untuk dapat dimanfaatkan. Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian diterbitkan, Perusahaan masih dalam proses mengajukan pencatatan aset dermaga tersebut ke Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar untuk menjadi bagian dari konsesi MNP.

49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

m) Construction Agreement of Makassar New Port (MNP) Quay Phase I (continued)

The Company entered into a Construction Agreement of MNP Quay Phase IA, with details of work as follows: (continued)

- *Agreement of work Package D regarding construction of facility building including mechanical and electrical of MNP amounted to Rp258,089,700 with PT Adhi Karya (Persero) Tbk based on Deed No. 30 from Ahmad Tauzan Siata, S.H., M.Kn., Notary in Makassar, dated January 31, 2018 with period of 390 calendar days since from the agreement was signed.*

- *This agreement of work was last amended through Addendum V No. 9/HK.301/ 10/PI.IV-2020 dated September 04, 2020 with changes on agreement amount into Rp283,679,319 and agreement period into 1,066 calendar days since the agreement was signed.*

On August 24, 2021, the Company entered into an agreement with the Makassar Main Port Authority Office and the Indonesian Navy ("LANTAMAL") for the construction of a pier for the navy and all costs incurred by the Company will be included in the MNP concession. On December 5, 2024, the pier has been largely completed and has been temporarily handed over to LANTAMAL for use. Until the issuance of the consolidated financial statements, the Company is still in the process of submitting the registration of the pier assets to the Makassar Main Port Authority Office to be part of the MNP concession.

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

m) Perjanjian Pembangunan Dermaga Makassar New Port (MNP) Tahap I (lanjutan)

Pada tanggal 22 Desember 2015, Perusahaan menerbitkan surat ke Walikota Makassar dimana diantaranya menyetujui untuk Perusahaan menanggung biaya pembebasan lahan ruas akses jalan tol MNP. Pada tanggal 4 Februari 2022, Perusahaan dan Direktorat Jenderal Bina Marga menandatangani berita acara serah terima tanah untuk pembangunan ruas akses jalan tol MNP dimana Perusahaan menyetujui untuk menyerahkan tanah tersebut setelah seluruh proses pengadaan tanah telah selesai dan memperoleh persetujuan pemegang saham Perusahaan. Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian diterbitkan, Perusahaan masih dalam proses mengajukan pencatatan aset berupa pembebasan lahan akses tol tersebut ke Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar untuk menjadi bagian dari konsesi MNP.

n) Perjanjian Kerja sama Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Petikemas Palaran Pelabuhan Samarinda

Pada tanggal 20 Juli 2007, Perusahaan mengadakan perjanjian kerja sama pembangunan dan pengoperasian Terminal Petikemas Palaran Pelabuhan Samarinda dengan Pemerintah Kota Samarinda dan PT Pelabuhan Samudera Palaran. Perjanjian ini berjangka waktu selama 50 tahun sejak masa uji coba, yaitu 3 tahun sejak ditandatanginya perjanjian.

Dalam perjanjian, Perusahaan mendapatkan *management fee/compensation fee* sebesar 10% dari total pendapatan kotor dari hasil pengoperasian Terminal Petikemas Palaran. Selain itu, Perusahaan juga menerima bagi hasil keuntungan sebesar persentase tertentu dari pendapatan kotor hasil pengoperasian Terminal Petikemas Palaran yang diatur lebih lanjut dalam perjanjian ini.

Pada akhir perjanjian, Perusahaan berhak memperoleh kepemilikan bangunan infrastruktur Terminal Petikemas Palaran dari PT Pelabuhan Samudera Palaran.

49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

m) Construction Agreement of Makassar New Port (MNP) Quay Phase I (continued)

On December 22, 2015, the Company issued a letter to the Mayor of Makassar in which among others the Company agreed to bear the cost of land clearance for the MNP toll road access. On February 4, 2022, the Company and the Directorate General of Highways signed a land handover minute for the construction of the MNP toll road access section where the Company agreed to hand over the land after the entire land acquisition process has been completed and the approval from the Company's shareholders has been obtained. Until the issuance of the consolidated financial statements, the Company is still in the process of submitting the registration of assets in form of land clearance for toll road access to the Makassar Main Port Authority Office to be part of the MNP concession.

n) Cooperation Agreement for The Construction and Operation of The Palaran Container Terminal Samarinda Port

On July 20, 2007, the Company entered into a cooperation agreement for the construction and operation of the Palaran Container Terminal, Samarinda Port with the Samarinda City Government and PT Pelabuhan Samudera Palaran. This agreement has a term of 50 years from the trial period, which was 3 years since the contract signing.

In this agreement, the Company received the management fee/compensation fee amounting to 10% of gross revenue of operating Palaran Container Terminal. In addition, the Company also received the profit sharing at certain percentage from gross revenue of operating Palaran Container Terminal as regulated in this agreement.

At the end of the agreement, the Company has the right to acquire ownership of the Palaran Container Terminal infrastructure building from PT Pelabuhan Samudera Palaran.

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

o) Perjanjian Pinjaman Biaya Pergantian Proyek Jalan Tol Cibitung-Cilincing

Berdasarkan Akta Perjanjian Layanan Dana Bergulir untuk Penggantian Pembelian Tanah dalam Rangka Pengusahaan Jalan Tol Ruas Cibitung-Cilincing antara Badan Layanan Umum - Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol ("BLU Set-BPJT") dan CTP dari Notaris Ny. Trie Sulistiowarni, S.H., No. 2 tanggal 4 Februari 2013, CTP memperoleh pinjaman untuk penggantian pembelian tanah dengan batas maksimal biaya pergantian Rp288.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

1. Seksi I: Cibitung - Telaga Asih sebesar Rp11.519.488.
2. Seksi II: Telaga Asih - Tembalang sebesar Rp87.445.713.
3. Seksi III: Tembalang - Tarumajaya sebesar Rp118.906.715.
4. Seksi IV: Tarumajaya - Cilincing sebesar Rp70.128.083.

Jangka waktu pinjaman adalah sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian sampai dengan selesainya proses pengadaan tanah. Nilai tambah pinjaman (bunga) sebesar tingkat bunga Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS") ditambah 1%. Nilai tambah diperhitungkan setiap bulan dan wajib dibayar setiap 3 (tiga) bulan. Denda tunggakan pembayaran nilai tambah sebesar 2% per bulan dari nilai tambah yang tertunggak.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, saldo pinjaman tersebut masing-masing sebesar Rp178.541.609 dan Rp464.538.398.

49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

o) Loan Agreement for Cibitung-Cilincing Toll Road Project Replacement Cost

Based on the Notarial Deed No. 2 dated February 4, 2013 by Mrs. Trie Sulistiowarni, S.H., a Notary in Jakarta , CTP has signed an agreement with Ministry of Public Works & Human Settlements - Public Service Agencies Secretariat of Toll Road Regulatory Body ("BLU Set-BPJT"). CTP obtained expense reimbursement loan on the purchase of land for Cibitung-Cilincing tol project for a maximum expense reimbursement amount of Rp288,000,000, with the following details:

1. *Section I: Cibitung - Telaga Asih amounting to Rp11,519,488.*
2. *Section II: Telaga Asih - Tembalang amounting to Rp87,445,713.*
3. *Section III: Tembalang - Tarumajaya amounting to Rp118,906,715.*
4. *Section IV: Tarumajaya - Cilincing amounting to Rp70,128,083.*

The term of the loan is from the date the agreement was signed until the completion of the land acquisition process. The added value of the loan (interest) is the interest rate of the Deposit Insurance Corporation ("LPS") plus 1%. Value added is calculated every month and must be paid every 3 (three) months. The penalty for arrears in payment of value added is 2% per month of the value added in arrears.

As of December 31, 2025 and 2024, the outstanding balance of the payable amounting to Rp178,541,609 and Rp464,538,398, respectively.

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

p) Perjanjian Konstruksi dan Penggunaan Infrastruktur BMS dan PT Freeport Indonesia (PTFI)

Pada tanggal 3 September 2021, BMS dan PT Freeport Indonesia ("PTFI") mengadakan perjanjian konstruksi dan penggunaan infrastruktur dimana BMS merancang, mengadakan, membangun, menguji dan melakukan uji kelayakan operasi atas pekerjaan sipil pada infrastruktur BMS sesuai dengan desain final, yang terdiri dari dermaga, trestle, jembatan, dan SWI (*sea water intake*), yang pelaksanaannya sesuai jadwal konstruksi yang tertuang di jadwal perjanjian, yaitu Desember 2021 - November 2022 untuk SWI, Desember 2021 - Desember 2022 untuk *trestle* dan jembatan, dan Desember 2021 - April 2023 untuk dermaga.

Pada tanggal 11 Mei 2023, BMS telah menerima Sertifikat Penerimaan Akhir dari PTFI dengan nomor MS-DD-0000-DCM-LTR-8606 dan mulai menerima *capacity payment*.

Beberapa ketentuan penting dalam perjanjian ini antara lain:

1. *Lease term* untuk perjanjian ini adalah 40 tahun terdiri dari 20 tahun jangka waktu awal ditambah 10 tahun perpanjangan pertama dan 10 tahun perpanjangan kedua.
2. Terdapat penalti yang akan dikenakan apabila PTFI membatalkan sewa pada 10 tahun awal dalam jangka waktu awal 20 tahun.
3. Pembatalan perjanjian harus disetujui kedua belah pihak atau tidak dapat dibatalkan sepihak saja, serta wajib memberikan pemberitahuan tertulis 180 hari sebelum tanggal pembatalan.
4. BMS membangun dermaga, trestle, jembatan, dan SWI (*sea water intake*). Freeport membangun alat-alat untuk menunjang operasionalnya seperti, conveyer, pipa, dan alat bongkar muat.

49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

p) BMS and PT Freeport Indonesia (PTFI) Infrastructure Construction and Use Agreement

On September 3, 2021, BMS and PT Freeport Indonesia ("PTFI") entered into Construction and Ulitisation Agreement where BMS is responsible for designing, procuring, constructing, testing, and conducting operational feasibility tests on civil works on BMS infrastructure, such as the wharf, trestle, bridge, and SWI (sea water intake), which will be put into operation according to the agreement construction schedule, which is December 2021 - November 2022 for the SWI, December 2021 - December 2022 for the trestle and bridge, and December 2021 - April 2023 for the wharf.

On May 11, 2023, BMS has received Final Acceptance Certicate from PTFI with document number MS-DD-0000-DCM-LTR-8606 and began receiving its capacity payment.

The following are key points in this agreement:

1. *The lease term for this agreement is 40 years, which includes a 20 years initial term plus 10 years for the first and 10 years for the second extensions.*
2. *If PTFI terminates the lease during the first 10 years of the initial 20-year term, a penalty will be applied.*
3. *The agreement cannot be canceled unilaterally, and written notice must be received 180 days before the cancellation date. Both parties must agree to the cancellation.*
4. *BMS will build the wharf, bridge, trestle, and SWI (sea water intake). Freeport builds equipment to support its operations, such as conveyers, pipes and loading and unloading equipment.*

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

p) Perjanjian Konstruksi dan Penggunaan Infrastruktur BMS dan PT Freeport Indonesia (PTFI) (lanjutan)

Terdapat arus kas masuk yang diterima oleh BMS atas proyek ini:

- *Capacity payment* merupakan kas yang diterima oleh BMS karena memberikan hak eksklusif penggunaan infrastruktur kepada PTFI, di mana *capacity payment* dapat diterima setelah sertifikat penerimaan akhir diterbitkan, estimasi pada April 2023. BMS akan menerima sebesar USD7.936.000 per tahunnya selama 20 tahun, untuk 10 tahun perpanjangan pertama BMS akan menerima USD9.920.000/tahun, masa perpanjangan 10 tahun kedua adalah USD12.400.000/tahun. Apabila PTFI melakukan pembatalan sewa selama masa sewa 10 tahun (dalam jangka waktu sewa 20 tahun) maka akan dikenakan denda sesuai Perjanjian Konstruksi pasal 14.8.
- *Milestone I* yaitu kas yang diterima atas pencapaian pembangunan tahun pertama sebesar 12% dari keseluruhan biaya konstruksi yang dikeluarkan pada periode 12 bulan sejak tanggal 3 September 2021. *Milestone II* yaitu kas yang diterima atas pencapaian pembangunan tahun kedua sebesar 12% dari keseluruhan biaya konstruksi yang dikeluarkan BMS untuk periode 24 bulan sejak 3 September 2021. Sampai dengan periode November 2022, BMS telah menerima *milestone payment* sebesar Rp55 miliar pada tanggal 17 November 2022, atas *Milestone I* yang dengan progres penyelesaian telah mencapai 70,476%. Apabila BMS mengalami keterlambatan dalam penyerahan akhir aset di mana tidak sesuai dengan jadwal konstruksi, maka akan dikenakan denda sebesar Rp700 juta per hari, maksimal Rp63 miliar (Perjanjian Konstruksi pasal 4.2.3).
- Kompensasi sebesar Rp36 miliar, merupakan kompensasi tambahan untuk biaya konstruksi. BMS telah menerima kompensasi ini pada tanggal 30 September 2022.

49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

p) BMS and PT Freeport Indonesia (PTFI) Infrastructure Construction and Use Agreement (continued)

There are cash inflows received by BMS for this project:

- *In exchange for granting PTFI exclusive use of infrastructure, BMS will receive capacity payments once the final acceptance certificate is issued in April 2023. BMS will earn USD7,936,000 annually for the next 20 years, USD9,920,000 annually for the first 10 years extension, and USD12,400,000 annually for the second 10 year extension. If PTFI terminates the lease within the initial 10 years, Article 14.8 of the Construction and Use Agreement about the penalty will apply (within the 20 year lease duration).*
- *Milestone I is the cash payment of 12% of total construction expenses incurred over a 12-month period beginning on September 3, 2021, for the first year's construction. Milestone II is the payment for the second year's construction of 12% of BMS's total construction expenses for a period of 24 months beginning September 3, 2021. BMS has received Rp55 billion for Milestone I on November 17, 2022, according to the construction progress up to 70.476% by November 2022. BMS will be penalized Rp700 million per day, up to a maximum of Rp63 billion, if the final handover of assets is delayed and not in accordance with the construction schedule (Construction and Use Agreement article 4.2.3).*
- *The additional compensation for construction costs is Rp36 billion. This payment has been received by BMS on September 30, 2022.*

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

q) Perjanjian Fasilitas *Midstream* LNG Benoa, Bali

Pada tanggal 11 Februari 2022, SPMT, PT Petra Daya Gas dan PT Bali Infra Gas membentuk Konsorsium *Midstream* Liquefied Natural Gas ("LNG") Bali ("MLB"). Berdasarkan perjanjian No. 189.PJ/061/IP/2022, No. HK.95.01/16.PEL-2022 dan No. 001.P/MLB/V/2022 pada tanggal 27 Mei 2022, PEL mengalihkan kepada MLB segala hak, kepentingan, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab atas perjanjian jasa fasilitas *midstream* LNG Benoa dengan PT PLN Indonesia Power No. 307.PJ/061/IP/2017 dan HK.0501/22/PEL-2017 tanggal 27 Desember 2017 yang telah di addendum beberapa kali terakhir pada tanggal 31 Desember 2023, berkaitan dengan lingkup pekerjaan dan perpanjangan jangka waktu sampai dengan 29 Februari 2024.

MLB dalam hal ini berkewajiban memberikan jasa pengurusan pengapalan LNG, dan jasa terminal LNG dan regasifikasi LNG kepada PT PLN Indonesia Power yang dihitung menggunakan *single rate* per MMBTU.

Pada tanggal 19 Desember 2024, SPMT, dan PT PLN Indonesia Power menandatangani perjanjian dalam pemberian Fasilitas *Midstream* LNG Benoa Bali No. HK.02/19/12/2/DLHK/DIRU/PLMT-24 dan No. 0998.Pj/DAN/01.03/PLNIP011002/2024.
Perjanjian ini dibuat melanjutkan pelayanan jasa yang sama setelah pembubaran MLB. SPMT sepakat untuk memberikan jasa terhitung sejak 1 Maret 2024 hingga 31 Agustus 2025.

Pada tanggal 22 Agustus 2025, perjanjian ini dinovasikan kepada PT PLN Energi Primer Indonesia dan diperpanjang jangka waktunya sampai dengan 31 Desember 2025. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, perjanjian tersebut masih dalam tahap perpanjangan.

49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

q) Midstream Facility Agreement LNG Benoa, Bali

On February 11, 2022, SPMT, PT Petra Daya Gas and PT Bali Infra Gas formed Consortium Midstream Liquefied Natural Gas ("LNG") Bali ("MLB"). Based on agreement No. 189.PJ/061/IP/2022, No.HK.95.01/16.PEL-2022 and No. 001.P/MLB/V/2022 date on May, 27 2022, PEL tranferred to MLB all rights, interests, obligations, authority and responsibility for the Benoa LNG midstream facility services agreement with PT PLN Indonesia Power No. 307.PJ/061/IP/2017 and HK.0501/22/PEL-2017 dated on December 27, 2017 which has been amended several times, most recently on December 31, 2023, regarding changes in MLB's scope of work and the extension of the period to February 29, 2024.

MLB is obliged to provide LNG shipping management services, LNG terminal services and LNG regasification to PT PLN Indonesia Power which calculated using single rate per MMBTU.

On December 19, 2024, SPMT and PT PLN Indonesia Power signed an agreement for the provision of the Midstream LNG Facility Benoa Bali No. HK.02/19/12/2/DLHK/DIRU/PLMT-24 and No. 0998.Pj/DAN/01.03/PLNIP011002/2024. This agreement is established to ensure the continuation of the same services after the dissolution of MLB. SPMT agreed to provide services from March 1, 2024 to August 31, 2025.

On August 22, 2025, this agreement was novated to PT PLN Energi Primer Indonesia and its term was extended until December 31, 2025. As of the completion date of the consolidated financial statements, this agreement is still in the process for extension.

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

r) Perjanjian Kerja Sama dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (DPLK BNI) tentang Layanan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP)

Pada tanggal 8 Februari 2023, Perusahaan melakukan perjanjian kerja sama dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (DPLK BNI) tentang Layanan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP).

Ruang lingkup perjanjian ini adalah pengelolaan dana PPIP karyawan Perusahaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Perusahaan berhak menentukan usia pensiun normal dan mengubah pilihan paket investasi, serta berhak menerima pemberitahuan mengenai hasil pengelolaan dana setiap bulan.
- Perusahaan juga dapat menyampaikan perubahan dan penambahan daftar rincian data karyawan dan jumlah iuran, serta karyawan Perusahaan memperoleh manfaat perlindungan jiwa dengan uang pertanggungan jiwa senilai Rp10.000.000 dan tidak dikenakan premi dan/atau biaya apapun.
- Perusahaan diwajibkan untuk menyetorkan iuran untuk dan atas nama karyawan Perusahaan serta daftar rincian data karyawan dan jumlah iuran kepada DPLK BNI.

49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

r) Cooperation agreement with Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (DPLK BNI) regarding Defined Contribution Pension Program Services (PPIP)

On February 8, 2023, the Company entered into a cooperation agreement with Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (DPLK BNI) regarding Defined Contribution Pension Program Services (PPIP).

The scope of this agreement is the management of PPIP funds of the Company's employee, with the following conditions:

- *The Company has the right to determine the normal retirement age and change the choice of investment packages, and has the right to receive notifications about the results of fund management on monthly basis.*
- *The Companies can also submit changes and additions to the list of employee data and the amount of contributions, and the Company's employees receive life protection benefits with a sum of life insurance amounting to Rp10,000,000 and are not subject to any premiums and/or fees.*
- *The Company are required to deposit contributions for and on behalf of the Company's employees as well as a detailed list of employee data and the amount of contributions to DPLK BNI.*

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

s) Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Jasa Layanan Operasi dan Pemeliharaan

Pada tanggal 23 Desember 2019, CTP mengadakan perjanjian dengan PT Jasamarga Tol Road Operator terkait Pekerjaan Pengadaan Jasa Layanan Operasi dan Pemeliharaan Pada Jalan Tol Cibitung-Cilincing dengan nilai kontrak Rp244.082.023 (termasuk PPN). Jangka waktu kontrak tersebut berlaku sejak tanggal ditandatangani kontrak sampai dengan ditandatangani Berita Acara Pengakhiran Kontrak.

Pada tanggal 23 Maret 2022, kontrak No. CTP-ADM-CTR-III-2022-JMTO-00003 diamendemen dimana para pihak sepakat untuk mengubah nilai kontrak menjadi Rp125.494.149 (termasuk PPN).

Total biaya yang dibayarkan oleh CTP untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing berjumlah Rp10.554.289 dan Rp17.497.875, yang dicatat sebagai biaya jasa.

t) Perjanjian Pemegang Saham - BNCT

Pada tanggal 23 Juni 2023, PTP1 dan PT INA-DPWorld Investment menandatangani Perjanjian Pemegang Saham dimana PTP1 dan SPS akan mendirikan perusahaan dengan jumlah saham sebanyak 10.000 lembar saham yang terbagi menjadi 5.100 lembar saham seri A yang dimiliki Perusahaan dan 4.900 saham seri B yang dimiliki PT INA-DPWorld Investment. Perusahaan tersebut didirikan dalam rangka pembangunan, pembiayaan, operasi dan pemeliharaan proyek Pelabuhan Belawan sesuai dengan Perjanjian Konstruksi dan Operasi yang telah disepakati. Perusahaan yang didirikan sehubungan dengan perjanjian diatas bernama PT Belawan New Container Terminal (“BNCT”) yang didirikan berdasarkan Akta No. 2 tanggal 1 September 2023.

49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

s) Agreement of Procurement of Operating and Maintenance Service

On December 23, 2019, CTP entered into an agreement with PT Jasamarga Tollroad Operator regarding the work of Procurement of Operating and Maintenance Service at the Cibitung-Cilincing Toll Road Construction Project with a contract value of Rp244,082,023 (including VAT). The term of the contract is valid from the date the contract is signed until the Minutes of Termination are signed.

On March 23, 2022, this contract with No. CTP-ADM-CTR-III-2022-JMTO-00003 was amended wherein both parties agreed to change the contract value to become Rp125,494,149 (including VAT).

The total expenses paid by CTP for the years ended December 31, 2025 and 2024 amounted to Rp10,554,289 and Rp17,497,875, respectively, which are recorded under cost of services.

t) Shareholder Agreement - BNCT

On June 23, 2023, PTP1 and PT INA-DPWorld Investment signed a Shareholders' Agreement in which PTP1 and SPS will establish a company with a total of 10,000 shares, divided into 5,100 Series A shares owned by the Company and 4,900 Series B shares owned by PT INA-DPWorld Investment. The company was established for the purpose of the development, financing, operation, and maintenance of the Belawan Port project in accordance with the Construction and Operation Agreement that has been agreed upon. The Company established in relation with the above agreement is PT Belawan New Container Terminal ("BNCT") which was established based on Deed No. 2 dated September 1, 2023.

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

u) Perjanjian Konstruksi dan Operasi BNCT

Pada tanggal 27 September 2023, PTP1 dan BNCT menandatangani Perjanjian Konstruksi dan Operasi ("COA") - Belawan New Container Terminal dimana PTP1, pada tanggal mulai, akan menyerahkan hak atas:

1. Lokasi Terminal Petikemas Belawan Fase I dan Fase II;
2. Seluruh peralatan awal yang berkaitan dengan kegiatan operasional terminal.

Selain itu, PTP1 juga memberikan, selama jangka waktu perjanjian, hak untuk:

1. Membangun dan menjalankan kegiatan operasional terminal;
2. Menjalankan usaha sesuai dengan Rencana Usaha Perpanjangan jika ada perpanjangan;
3. Menempati dan menggunakan lokasi terminal untuk kegiatan usaha;
4. Berbagi penggunaan akses jalan Pelindo;
5. Menggunakan peralatan awal yang tersedia.

Atas perjanjian ini, BNCT diwajibkan untuk melakukan pembayaran Uang Muka Sewa ("ASR") sebesar USD70.000.000 (nilai penuh) ke rekening *escrow*. Disamping itu, BNCT diwajibkan untuk membayar sewa lokasi per triwulan ("QSR") untuk periode sejak tanggal mulai hingga tanggal penyesuaian sewa lokasi triwulan pertama dalam rupiah yang setara dengan USD8.750.000 (nilai penuh) pada nilai tukar. Setelah tanggal penyesuaian pertama, BNCT harus membayar kepada PTP1 dalam Rupiah dengan nilai sesuai dengan ketentuan pada skedul pembayaran.

Periode perjanjian ini adalah 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang sampai dengan periode 20 (dua puluh) tahun berikutnya.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, PTP1 telah mencatat pendapatan atas ASR dan QSR sebesar Rp726.942.481, dimana sebesar Rp152.197.957 merupakan akrual atas pendapatan QSR dan dicatat sebagai bagian dari aset tidak lancar lainnya (Catatan 19). Disamping itu, PTP1 juga mencatat uang muka atas PPh final dari penerimaan ASR sebesar Rp103.390.000 sebagai bagian dari aset tidak lancar lainnya (Catatan 19).

49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

u) Construction and Operation Agreement BNCT

On September 27, 2023, PTP1 and BNCT entered into the Construction and Operation Agreement ("COA") - Belawan New Container Terminal whereby PTP1, on the commencement date, will assign the rights to:

1. *Location of Belawan Container Terminal Phase I and Phase II;*
2. *All initial equipments related to terminal operations.*

In addition, PTP1 also grants, during the term of the agreement, the rights to:

1. *Build and conduct terminal operation activities;*
2. *Conduct business in accordance with the Extension Business Plan if there is an extension;*
3. *Occupy and use the terminal location for business activities;*
4. *Share the Pelindo road access usage;*
5. *Use initial equipment available.*

For this agreement, BNCT is required to pay Advanced Site Rent ("ASR") fee of USD70,000,000 (full amount) into an escrow account. In addition, BNCT is required to pay Quarterly Site Rent ("QSR") for the period from the commencement date to the first quarterly site rent adjustment date in rupiah equivalent to USD8,750,000 (full amount) at the exchange rate. After the date of the first adjustment, BNCT must pay to PTP1 with amount in Rupiah as accordance with the payment schedule.

The period of this agreement is 30 (thirty) years and may be extended for up to a further period of 20 (twenty) years.

For the year ended December 31, 2024, PTP1 has recorded revenue from ASR and QSR amounting to Rp726,942,481, of which Rp152,197,957 is an accrual of QSR revenue and recorded as part of other non-current assets (Note 19). In addition, PTP1 also recognizes advances from final income tax of ASR receipts amounting to Rp103,390,000 as part of other non-current assets (Note 19).

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

v) Perjanjian Pemanfaatan Dermaga - BNCT

Pada tanggal 27 September 2023, PTP1 dan BNCT menandatangani Perjanjian Pemanfaatan Dermaga ("WUA") - Terminal Petikemas Belawan Internasional ("TPKB") dengan jangka waktu perjanjian selama 6 (enam) tahun. Dalam perjanjian ini PTP1, pada tanggal mulai, akan menyerahkan hak atas:

1. Lokasi TPKB;
2. Seluruh peralatan awal yang berkaitan dengan kegiatan operasional terminal.

Disamping itu, PTP1 juga memberikan, selama jangka waktu perjanjian, hak untuk:

1. Membangun dan menjalankan kegiatan operasional terminal;
2. Menempati dan menggunakan lokasi terminal untuk kegiatan usaha;
3. Berbagi hak untuk menggunakan atau menempati yang manapun dari Fasilitas Bersama;
4. Berbagi penggunaan akses jalan Pelindo dan gerbang akses utama;
5. Menggunakan peralatan awal, jaringan TI dan perangkat keras yang tersedia.

w) Perjanjian Kerja sama Kegiatan Bongkar Muat Petikemas - PT Tangguh Samudera Jaya

Pada tanggal 30 September 2021, IPC TPK dan PT Tangguh Samudera Jaya ("TSJ") menandatangani perjanjian kerja sama kegiatan bongkar muat petikemas luar negeri di dermaga 303-305 area Tanjung Priok 2. Berdasarkan perjanjian, bagi hasil adalah sebesar 52,5% untuk IPC TPK dan 47,5% untuk TSJ. Jangka waktu perjanjian selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2022. Perjanjian ini telah beberapa kali diperpanjang, terakhir sampai dengan 30 Juni 2024.

49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

v) Wharf Utilization Agreement - BNCT

On September 27, 2023, PTP1 and BNCT signed Wharf Utilization Agreement ("WUA") - Belawan International Container Terminal ("BICT") with period of the agreement is 6 (six) years. Under this agreement PTP1, on the commencement date, will grants the rights of:

1. *Location of BICT;*
2. *All initial equipment related to terminal operations.*

In addition, PTP1 also grants, during the term of the agreement, the rights to:

1. *Build and conduct terminal operation activities;*
2. *Occupy and use the terminal premises for business activities;*
3. *Occupy and use the terminal location for business activities;*
4. *Share the Pelindo road access and main gate access usage;*
5. *Use initial equipment, IT network and hardware equipment available.*

w) Container Loading and Unloading Cooperation Agreement - PT Tangguh Samudera Jaya

On September 30, 2021, IPC TPK and PT Tangguh Samudera Jaya ("TSJ") signed an agreement for the loading and unloading activities of international containers at docks 303-305 in Tanjung Priok 2 area. Based on the agreement, the revenue-sharing composition are 52.5% for IPC TPK and 47.5% for TSJ. The term of this agreement is for 1 (one) year from October 1, 2021 to September 30, 2022. This agreement has been extended several times, most recent until June 30, 2024.

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

w) Perjanjian Kerja sama Kegiatan Bongkar Muat Petikemas - PT Tangguh Samudera Jaya (lanjutan)

Pada tanggal 30 April 2024, TSJ mengakhiri kontrak lebih awal dengan IPC TPK dan menyepakati Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Jasa Bongkar Muat Peti Kemas Area Dermaga 303-305 beserta Lapangan Penumpukannya di Pelabuhan Tanjung Priok dengan SPTP dengan pola bangun operasi transfer, dimana objek kerja sama akan diserahkan kepada SPTP pada akhir periode kerja sama.

Perjanjian ini dibagi menjadi 2 fase, yaitu:

- Fase 1 - Fase Segmentasi Internasional

  TSJ adalah pihak yang melakukan kontrak langsung dengan pelanggan akhir. Kontrak berupa sewa sebesar Rp180,75 miliar per tahun yang dibayar bertahap kuartal. Fase 1 berlaku dari Mei 2024 sampai dengan tahun 2030.

- Fase 2 - Fase Segmentasi Domestik

  SPTP adalah pihak yang melakukan kontrak langsung dengan pelanggan akhir. Kontrak berupa *revenue sharing*. Fase 2 berlaku sejak berakhirnya Fase 1 sampai dengan 2 April 2049.

Peralihan dari Fase 1 Segmentasi Internasional ke Fase 2 Segmentasi Domestik diperkirakan secepat-cepatnya akan dimulai pada tahun 2030. Peralihan dapat disesuaikan sewaktu-waktu sesuai dengan keputusan atau ketentuan dari Perusahaan.

Berdasarkan Perjanjian Pengalihan Sebagian Hak dan Kewajiban antara Perusahaan, IPC TPK dan TSJ tanggal 8 Mei 2024, SPTP mengalihkan kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan kepada IPC TPK. Dengan demikian, IPC TPK berhak menerima sewa pada Fase 1, serta menerima pembayaran dari pelanggan akhir dan melakukan pembayaran *revenue sharing* kepada TSJ pada Fase 2.

49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

w) Container Loading and Unloading Cooperation Agreement - PT Tangguh Samudera Jaya (continued)

On April 30, 2024, TSJ early terminated the contract with IPC TPK and entered into a Cooperation Agreement for Container Loading and Unloading Services in the 303-305 Pier Area along with its Stacking Yard at Tanjung Priok Port with SPTP with a build-operate-transfer scheme, where the object of the cooperation will be transferred to SPTP at the end of the cooperation period.

This agreement is divided into 2 phases, namely:

- *Phase 1 - International Segmentation Phase*
  TSJ is the party that perform contracts directly with end customer. The contract is a lease contract of Rp180.75 billion per year which are quarterly paid. Phase 1 (one) is valid from May 2024 until 2030.

- *Phase 2 - Domestic Segmentation Phase*
  SPTP is the party that perform contracts directly with end customer. The contract is a revenue sharing contract. Phase 2 is valid from the end of Phase 1 to April 2, 2049.

Shifting from Phase 1 International Segmentation to Phase 2 Domestic Segmentation is estimated to start on 2030 at the earliest. The shifting can be adjusted anytime in accordance with the decision or provision from the Company.

Based on Agreement of Transfers of Parts of Right and Obligations between the Company, IPC TPK and TSJ dated May 8, 2024, SPTP transferred the operation and maintenance activities to IPC TPK. Therefore, IPC TPK entitled to rent revenue in Phase 1, and entitled to receive revenues from end customers and make payment of sharing revenues to TSJ in Phase 2.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

50. PERKARA HUKUM

a) Gugatan oleh PT Intra Faedah Utama terkait Surat Perjanjian tentang Pengelolaan Hak atas Tanah

Pada tanggal 5 November 2025, PT Intra Faedah Utama mengajukan gugatan kepada Perusahaan dengan gugatan wanprestasi dengan nomor perkara No. 747/Pdt.G/2025/PN Jkt.Utr atas perjanjian pengelolaan tanah dengan nomor:

1. HK.566/15/16/C.TPK-01., tanggal 31 Desember 2001 (Surat Perjanjian Blok C)
2. HK.566/11/16/C.TPK-00., tanggal 6 September 2000 (Surat Perjanjian Blok D)

Penanganan perkara ini dilakukan oleh tim hukum Perusahaan dengan hasil penanganan:

- 19 November 2025: Sidang Pertama
- 3 Desember 2025: Kehadiran Pelindo tidak dianggap hadir karena tidak ada Surat Kuasa Khusus.
- 10 Desember 2025: Sidang pertama dengan kelengkapan dokumen yang telah lengkap;
- 18 Desember 2025: Mediasi Pertama;
- 8 Januari 2026: Mediasi Kedua;
- 15 Januari 2026: Menunggu hasil mediasi

b) Gugatan oleh ahli waris S.Z Bokotei terkait klaim tanah seluas 2 Hektar

Gugatan diajukan oleh penggugat yaitu Ahli Waris S.Z Bokotei dengan Perusahaan sebagai tergugat dalam perkara nomor: Perkara 81/Pdt.G/2024/PN.KPG. Objek perkara Tanah seluas 2 Hektar Are di HPL Milik Perusahaan oleh Ahli Waris S.Z Bokotei. Penanganan Perkara dilakukan Tim Hukum Internal Perusahaan dan JPN Kejati NTT, yaitu :

1. Tingkat PN: Mengabulkan gugatan Penggugat Sebagian, menyatakan PT Pelindo untuk membayar kerugian materiil Penggugat (Pelindo Kalah)
2. Tingkat PT: Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Pelindo Menang)
3. Tingkat Kasasi: Dalam Proses Kasasi (Menunggu Putusan Kasasi)

50. LAWSUIT

a) Lawsuit filed by PT Intra Faedah Utama regarding the Agreement on the Management of Land Rights

On November 5, 2025, PT Intra Faedah Utama filed a lawsuit against the Company for alleged breach of contract (wanprestasi) under case number 747/Pdt.G/2025/PN Jkt.Utr, in relation to the land management agreement with number:

1. *HK.566/15/16/C.TPK-01, dated December 31, 2001 (Block C Agreement Letter)*
2. *HK.566/11/16/C.TPK-00, dated September 6, 2000 (Block D Agreement Letter)*

The handling of this case was carried out by the Company's legal team, with the results of the handling as follows:

- *November 19, 2025: First hearing*
- *December 3, 2025: Pelindo's presence was not deemed valid due to the absence of a Special Power of Attorney*
- *December 10, 2025: First hearing conducted with all required documentation completed*
- *December 18, 2025: First mediation session*
- *January 8, 2026: Second mediation session*
- *January 15, 2026: Awaiting mediation results*

b) Lawsuit filed by PT Intra Faedah Utama regarding the Agreement on the Management of Land Rights

A lawsuit was filed by the plaintiff, the heir of S.Z. Bokotei, with the Company as the defendant in case number 81/Pdt.G/2024/PN.KPG. The object of the dispute is 2 hectares of land located on the Company's HPL (Right to Manage) area, claimed by the heir of S.Z. Bokotei. The case is being handled by the Company's Internal Legal Team together with JPN Kejati NTT . The case developments are as follows:

1. *District Court (PN) Level: The court granted part of the plaintiff's claim and ordered PT Pelindo to pay the plaintiff's material losses. (Pelindo lost)*
2. *High Court (PT) Level: The court declared the plaintiff's lawsuit inadmissible. (Pelindo won)*
3. *Supreme Court (Cassation) Level: Currently under review at the Supreme Court. (Awaiting Cassation Decision).*

50. PERKARA HUKUM (lanjutan)

c) Gugatan oleh ahli waris Ince Baharuddin, dkk terkait klaim tanah adat milik orang tua berdasarkan persil No. 2 D.II & Kohir No. 57 C.1 tahun 1942

Penanganan perkara ini dilakukan oleh tim hukum Perusahaan dengan hasil penanganan:

1. Tingkat PN: Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Perusahaan Menang);
2. Tingkat PT: Menguatkan Putusan PN (Perusahaan Menang);
3. Tingkat Kasasi: Perusahaan kalah dengan amar putusan, (a) menyatakan Ince Baharuddin sebagai pemilik sah atas tanah sengketa, (b) Penerbitan HPL merupakan PMH, (c) Sertipikat HPL tidak sah;
4. Tingkat PK: Menolak permohonan PK Pertamina, H. Andi Parenrengi, dan Perusahaan;
5. PK kedua Pertamina telah diputus dengan amar Putusan Ditolak;
6. Tim Legal HO melalui Saleh & Partners melakukan penelusuran dokumen historis terhadap alat bukti yang digunakan oleh Ince Baharuddin, dkk dalam perkara tersebut;
7. Terhadap objek perkara tersebut tidak dapat dilakukan eksekusi karena salah objek (*error in objecto*);
8. Ince Baharuddin, dkk melalui kuasa hukumnya menyurat ke PN Makassar tanggal 29 Agustus 2025 perihal Permohonan Tindak Lanjut Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Putusan 207 jo. Putusan PT 293 jo. Putusan Kasasi 2919 jo. Putusan PK jo. Putusan PK II 71 ;
9. Pada tanggal 24 September 2025 PN Makassar memanggil Perusahaan sebagai Termohon Eksekusi I atas Putusan 207 jo. Putusan PT 293 jo. Putusan Kasasi 2919 jo. Putusan PK jo. Putusan PK II 71 melalui Surat Panggilan Peneguran (Aanmaning) dihadiri oleh tim Hukum Perusahaan dan JPN Kejati Sulsel pada tanggal 28 Oktober 2025.

50. LAWSUIT (continued)

c) A lawsuit was filed by the heirs of Ince Baharuddin and others regarding a claim over customary land allegedly owned by their parents based on Persil No. 2 D.II and Kohir No. 57 C.1 of the year 1942.

The case is handled by the Company's Legal Team, with the following outcomes:

1. *District Court (PN) Level: The plaintiff's lawsuit was declared inadmissible. (Company won)*
2. *District Court (PN) Level: The plaintiff's lawsuit was declared inadmissible. (Company won)*
3. *Supreme Court (Cassation) Level: The Company lost, with the judgment stating that: (a) Ince Baharuddin is the lawful owner of the disputed land; (b) The issuance of the HPL was deemed an unlawful act; (c) The HPL certificate was declared invalid.*
4. *Judicial Review (PK) I: The Supreme Court rejected the PK petitions submitted by Pertamina, H. Andi Parenrengi, and the Company.*
5. *Judicial Review (PK) II – Pertamina: The second PK filed by Pertamina was decided and rejected.*
6. *Historical Document Review: The Head Office Legal Team, through Saleh & Partners, conducted a review of historical documents relating to the evidence submitted by Ince Baharuddin and others in the case.*
7. *Execution of Judgment: The object of the dispute cannot be executed due to an error in objecto (incorrect object).*
8. *Execution Request: On 29 August 2025, Ince Baharuddin and others, through their legal counsel, submitted a letter to the Makassar District Court requesting follow-up actions for execution of Decision No. 207 jo. PT Decision No. 293 jo. Cassation Decision No. 2919 jo. PK Decision jo. PK II Decision No. 71.*
9. *Court Summons (Aanmaning): On 24 September 2025, the Makassar District Court summoned the Company as Execution Respondent I regarding Decision No. 207 jo. PT Decision No. 293 jo. Cassation Decision No. 2919 jo. PK Decision jo. PK II Decision No. 71 through an Aanmaning (warning summons). The summons was attended by the Company's Legal Team and the JPN of the South Sulawesi High Prosecutor's Office on 28 October 2025.*

50. PERKARA HUKUM (lanjutan)

d) Gugatan perbuatan melawan hukum oleh koperasi TKBM Samudera Sejahtera terkait dengan penetapan tarif dan upah TKBM

Koperasi TKBM Samudera Sejahtera selaku penggugat yang mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan nomor register perkara: 1.218/Pdt.G/2021/PN.Smr. kepada Para Tergugat sebagai berikut:

1. Tergugat I : PT Pelabuhan Samudera Palaran
2. Turut Tergugat I : Perusahaan
3. Turut Tergugat II : KSOP Samarinda
4. Turut Tergugat III : Ketua INSA
5. Turut Tergugat IV : Ketua DPC ALFI
6. Turut Tergugat V : Ketua DPC APBMI

Gugatan PMH oleh TKBM Komura di Pengadilan Negeri Samarinda. Penggugat menggugat terhadap Berita Acara Penetapan Upah TKBM Pelabuhan Samarinda dan Tarif Tambahan CHC (Container Handling Charge) yang dibuat tanggal 28 Juli 2017 sehingga merugikan Penggugat.

Penanganan Perkara dilakukan Tim Hukum Internal Perusahaan dengan hasil penanganan:

1. Tingkat PN: Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian (Pelindo Kalah).
2. Tingkat PT: Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda (Perseroan Menang)
3. Tingkat Kasasi: Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi (Perseroan Menang).
4. Tingkat PK: Saat ini Pihak Penggugat telah Mengajukan upaya Peninjauan Kembali.
5. Upaya PK ditolak dengan nomor putusan 697 PK/PDT/2025. (Perusahaan Menang).

50. LAWSUIT (continued)

d) A tort lawsuit was filed by the TKBM Samudera Sejahtera Cooperative regarding the determination of TKBM tariff rates and wages.

The TKBM Samudera Sejahtera Cooperative, as the plaintiff, filed a tort lawsuit registered under case number 1.218/Pdt.G/2021/PN.Smr. against the following defendants:

1. *Defendant I: PT Pelabuhan Samudera Palaran*
2. *Co-Defendant I: The Company*
3. *Co-Defendant II: KSOP Samarinda*
4. *Co-Defendant III: Chairman of INSA*
5. *Co-Defendant IV: Chairman of DPC ALFI*
6. *Co-Defendant V: Chairman of DPC APBMI*

The lawsuit concerns an allegation of unlawful conduct (PMH) filed by TKBM Komura before the Samarinda District Court. The plaintiff challenged the Minutes of Determination of TKBM Wages for Samarinda Port and the Additional CHC (Container Handling Charge) Tariff issued on 28 July 2017, which the plaintiff claims caused financial losses.

The case is handled by the Company's Internal Legal Team, with the following outcomes:

1. *District Court (PN) Level: The court granted part of the plaintiff's claim. (Company lost)*
2. *High Court (PT) Level: The High Court overturned the decision of the Samarinda District Court. (Company won)*
3. *Supreme Court (Cassation) Level: The Supreme Court rejected the cassation petition filed by the Cassation Petitioner. (Company won)*
4. *Judicial Review (PK) Level: The plaintiff subsequently filed a Judicial Review petition.*
5. *Judicial Review Decision: The PK petition was rejected under Decision No. 697 PK/PDT/2025. (Company won).*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

51. INFORMASI SEGMEN / *51. SEGMENT INFORMATION*

Semua kegiatan operasional Group berada di Indonesia. Group menyajikan segmen operasi berdasarkan operasi kepelabuhan dan jasa lainnya.

All of the Group's operational activities are located in Indonesia. The Group presents its operating segments based on port operations and other related services.

Informasi yang menyangkut segmen usaha Grup adalah sebagai berikut:

Information concerning the Group's business segments is as follows:

	31 Desember/*December 31*, 2025					
	Operasi Kepelabuhanan/ *Port Operation*	**Jasa Lainnya/ *Other Services***	**Total Sebelum Eliminasi/*Total Before Elimination***	**Eliminasi/ *Elimination***	**Total/ *Total***	
Pendapatan operasi segmen						*Segment operating revenues*
Pendapatan operasi eksternal	32.055.020.812	4.673.253.240	36.728.274.052	-	36.728.274.052	*External operating revenues*
Pendapatan operasi antar segmen	13.722.399.025	4.941.671.566	18.664.070.591	(18.664.070.591)	-	*Inter-segment operating revenues*
Total pendapatan operasi segmen	**45.777.419.837**	**9.614.924.806**	**55.392.344.643**	**(18.664.070.591)**	**36.728.274.052**	***Total segment operating revenues***
Beban operasi	(39.481.718.282)	(8.301.699.925)	(47.783.418.207)	19.194.594.588	(28.588.823.619)	*Operating expenses*
Pendapatan operasi lainnya - neto	1.450.211.062	137.658.434	1.587.869.496	(2.268.812.940)	(680.943.444)	*Other operating income - net*
Laba usaha	**7.745.912.617**	**1.450.883.315**	**9.196.795.932**	**(1.738.288.943)**	**7.458.506.989**	***Operating income***
Pendapatan keuangan	1.114.512.890	224.505.652	1.339.018.542	(438.754.079)	900.264.463	*Finance income*
Beban keuangan	(2.726.459.827)	(1.187.636.683)	(3.914.096.510)	947.359.950	(2.966.736.560)	*Finance costs*
Bagian laba entitas asosiasi dan pengendalian bersama entitas - neto	3.921.874.542	(775.902.325)	3.145.972.217	(2.712.909.025)	433.063.192	*Equity in income of associates and joint control entity - net*
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan badan	**10.055.840.222**	**(288.150.041)**	**9.767.690.181**	**(3.942.592.097)**	**5.825.098.084**	***Income before final tax and corporate income tax***
Beban pajak final	(400.998.153)	(215.724.804)	(616.722.957)	(113.903.967)	(730.626.924)	*Final tax expense*
Laba sebelum pajak penghasilan badan	**9.654.842.069**	**(503.874.845)**	**9.150.967.224**	**(4.056.496.064)**	**5.094.471.160**	***Income before corporate income tax***
Pajak penghasilan badan						***Corporate income tax***
Kini	(996.262.742)	(151.629.502)	(1.147.892.244)	3.101.533	(1.144.790.711)	*Current*
Tangguhan	484.211.746	(70.586.422)	413.625.324	-	413.625.324	*Deferred*
Laba tahun berjalan	**9.142.791.073**	**(726.090.769)**	**8.416.700.304**	**(4.053.394.531)**	**4.363.305.773**	***Income for the year***
Posisi keuangan						***Financial position***
Aset segmen	156.444.764.965	27.650.419.557	184.095.184.522	58.040.378.803	126.054.805.719	*Segment assets*
Liabilitas segmen	73.882.130.861	21.068.725.356	94.950.856.217	19.253.654.264	75.697.201.953	*Segment liabilities*
Penyusutan dan amortisasi segmen	(3.904.993.250)	(412.809.663)	(4.317.802.913)	504.503.523	(3.813.299.390)	*Segment depreciation and amortization*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

***PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

51. INFORMASI SEGMEN (lanjutan)

Informasi yang menyangkut segmen usaha Grup adalah sebagai berikut: (lanjutan)

51. SEGMENT INFORMATION (continued)

Information concerning the Group's business segments is as follows: (continued)

	31 Desember/*December 31*, 2024					
	Operasi Kepelabuhanan/ *Port Operation*	**Jasa Lainnya/ *Other Services***	**Total Sebelum Eliminasi/*Total Before Elimination***	**Eliminasi/ *Elimination***	**Total/ *Total***	
Pendapatan operasi segmen						*Segment operating revenues*
Pendapatan operasi eksternal	32.861.740.492	1.972.127.966	34.833.868.458	-	34.833.868.458	*External operating revenues*
Pendapatan operasi antar segmen	13.757.494.049	6.273.716.448	20.031.210.497	(20.031.210.497)	-	*Inter-segment operating revenues*
Total pendapatan operasi segmen	**46.619.234.541**	**8.245.844.414**	**54.865.078.955**	**(20.031.210.497)**	**34.833.868.458**	***Total segment operating revenues***
Beban operasi	(41.020.591.449)	(7.077.809.924)	(48.098.401.373)	19.741.900.099	(28.356.501.274)	*Operating expenses*
Pendapatan operasi lainnya - neto	751.221.656	102.401.123	853.622.779	(1.044.231.385)	(190.608.606)	*Other operating income - net*
Laba usaha	**6.349.864.748**	**1.270.435.613**	**7.620.300.361**	**(1.333.541.783)**	**6.286.758.578**	***Operating income***
Pendapatan keuangan	1.051.453.129	135.434.136	1.186.887.265	(348.006.036)	838.881.229	*Finance income*
Beban keuangan	(2.649.296.184)	(1.129.306.759)	(3.778.602.943)	773.915.221	(3.004.687.722)	*Finance costs*
Bagian laba entitas asosiasi dan pengendalian bersama entitas - neto	4.809.086.580	(545.425.791)	4.263.660.789	(3.723.105.670)	540.555.119	*Equity in income of associates and joint control entity - net*
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan badan	**9.561.108.273**	**(268.862.801)**	**9.292.245.472**	**(4.630.738.268)**	**4.661.507.204**	***Income before final tax and corporate income tax***
Beban pajak final	(532.105.844)	(151.134.587)	(683.240.431)	3.177.162	(680.063.269)	*Final tax expense*
Laba sebelum pajak penghasilan badan	**9.029.002.429**	**(419.997.388)**	**8.609.005.041**	**(4.627.561.106)**	**3.981.443.935**	***Income before corporate income tax***
Pajak penghasilan badan						***Corporate income tax***
Kini	(751.628.536)	(135.136.152)	(886.764.688)	642.849	(886.121.839)	*Current*
Tangguhan	557.345.827	150.469.422	707.815.249	-	707.815.249	*Deferred*
Laba tahun berjalan	**8.834.719.720**	**(404.664.118)**	**8.430.055.602**	**(4.626.918.257)**	**3.803.137.345**	***Income for the year***
Posisi keuangan						***Financial position***
Aset segmen	152.089.669.551	21.461.234.382	173.550.903.933	(46.043.168.174)	127.507.735.759	*Segment assets*
Liabilitas segmen	76.010.889.283	21.864.857.772	97.875.747.055	(20.554.864.045)	77.320.883.010	*Segment liabilities*
Penyusutan dan amortisasi segmen	(3.937.721.458)	(323.319.149)	(4.261.040.607)	484.805.792	(3.776.234.815)	*Segment depreciation and amortization*

52. TAMBAHAN INFORMASI ARUS KAS

52. *SUPPLEMENTARY CASH FLOWS INFORMATION*

Aktivitas non-kas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, adalah sebagai berikut:

Non-cash of investing activities for the year ended December 31, 2025 and 2024, are as follow:

	Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *For the year then Ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Penambahan aset tetap melalui penambahan utang	1.940.248.706	737.427.949	*Acquisition of fixed assets through payable*
Penambahan properti investasi melalui penambahan utang	17.338.365	-	*Acquisition of investment properties through payable*
Penambahan aset takberwujud melalui penambahan utang	822.194.138	-	*Acquisition of intangible assets through payable*
Penambahan aset takberwujud melalui kapitalisasi bunga pinjaman	408.797.948	409.877.620	*Acquisition of intangible assets through interest capitalization*
Kapitalisasi biaya pinjaman ke aset tetap	-	37.349.708	*Capitalization of borrowing costs*
Penambahan aset tetap melalui uang muka	31.271.801	168.139.314	*Acquisition of fixed assets through advance*
Penambahan aset hak-guna melalui liabilitas sewa	464.146.700	48.523.823	*Addition of right-of-use assets through lease liabilities*
Penambahan aset tetap melalui penyelesaian piutang usaha	-	11.640.391	*Addition of fixed assets through settlement of trade receivables*
Penambahan aset tetap melalui perjanjian kerja sama *built, operate, transfer*	19.968.643	108.430.009	*Addition of fixed assets through cooperation agreement built, operate, and transfer*
Penambahan aset tetap melalui kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya	1.264.805.410	-	*Addition of fixed assets through restricted cash and cash equivalent*

Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan pada laporan arus kas konsolidasian adalah sebagai berikut:

Movement of liabilities arising from financing activities in the consolidated statement of cash flows are as follows:

			Non- arus kas/*Non-cash flow*			
	1 Januari 2025/ *January 1, 2025*	**Arus kas/ *Cash flow***	**Selisih kurs/ *Foreign exchange difference***	**Lainnya/ *Others***	**31 Desember 2025/ *Decemer 31, 2025***	
Pinjaman bank jangka pendek	-	-	-	-	-	*Short-term bank loans*
Utang bank	24.639.658.398	13.256.105.816	696.512.799	-	38.592.277.013	*Bank loan*
Utang obligasi	26.822.800.176	(17.787.730.763)	(382.409.073)	969.660	8.653.630.000	*Bonds payable*
Dividen	-	(1.788.523.268)	-	-	(1.788.523.268)	*Dividend*
Liabilitas sewa	910.259.530	(585.313.070)	-	481.149.565	806.096.025	*Lease liabilities*
Total	**51.220.142.873**	**(6.269.513.248)**	**314.103.726**	**482.119.225**	**45.746.852.576**	***Total***

52. TAMBAHAN INFORMASI ARUS KAS (lanjutan)

Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan pada laporan arus kas konsolidasian adalah sebagai berikut: (lanjutan)

52. SUPPLEMENTARY CASH FLOWS INFORMATION (continued)

Movement of liabilities arising from financing activities in the consolidated statement of cash flows are as follows: (continued)

	1 Januari 2024/ *January 1, 2024*	Arus kas/ *Cash flow*	Non- arus kas/*Non-cash flow*		31 Desember 2024/ *Decemer 31, 2024*	
			Selisih kurs/ *Foreign exchange difference*	Lainnya/ *Others*		
Pinjaman bank jangka pendek	3.330.172	(3.330.172)	-	-	-	*Short-term bank loans*
Utang bank	14.396.862.653	9.642.774.032	603.943.752	(3.922.039)	24.639.658.398	*Bank loan*
Utang obligasi	33.124.052.497	(7.579.055.331)	1.389.934.668	(112.131.658)	26.822.800.176	*Bonds payable*
Dividen	-	(1.152.575.231)	-	-	(1.152.575.231)	*Dividend*
Liabilitas sewa	487.723.464	(185.710.401)	-	608.246.467	910.259.530	*Lease liabilities*
Total	**48.011.968.786**	**722.102.897**	**1.993.878.420**	**492.192.770**	**51.220.142.873**	***Total***

53. REKLASIFIKASI AKUN

Grup melakukan reklasifikasi pada beberapa akun pada dalam laporan keuangan tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan untuk tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Reklasifikasi tersebut adalah sebagai berikut:

53. RECLASSIFICATION OF ACCOUNTS

The Group reclassified several accounts financial statements as of December 31, 2024 and for the year then ended to conform with the presentation for the financial statements as of December 31, 2025, and for the year then ended. The reclassifications are as follow:

Laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2024

Consolidated financial position as of December 31, 2024

	Dilaporkan sebelumnya/ *As previously reported*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Diklasifikasikan kembali/ *As reclassified*	
Aset lancar				***Current asset***
Piutang usaha - neto				*Trade receivables - net*
Pihak ketiga	1.123.769.621	429.723.382	1.553.493.003	*Third parties*
Pihak berelasi	377.684.713	81.984.206	459.668.919	*Related parties*
Aset kontrak - neto				*Contract assets - net*
Pihak ketiga	534.795.501	(429.723.382)	105.072.119	*Third parties*
Pihak berelasi	256.219.032	(81.984.206)	174.234.826	*Related parties*
Pajak dibayar dimuka	976.308.923	(201.865.651)	774.443.272	*Prepaid taxes*
Aset tetap - neto	40.929.943.787	112.893.680	41.042.837.467	*Fixed assets - net*
Aset kontrak - tidak lancar	5.394.273.652	(112.893.680)	5.281.379.972	*Contract assets - non-current*
Aset tidak lancar				***Non-current asset***
Taksiran tagihan restitusi pajak	1.060.014.605	82.405.782	1.142.420.387	*Estimated claims for tax refund*
Liabilitas jangka pendek				***Current liabilities***
Utang pajak	619.949.962	(119.459.869)	500.490.093	*Taxes payable*
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	-	463.764.537	463.764.537	*Short-term employee benefits liability*
Utang usaha - pihak berelasi	577.575.737	(481.009.888)	96.565.849	*Trade payables - related parties*
Liabilitas jangka pendek lainnya				*Other current liabilities*
Pihak berelasi	398.157.518	481.009.888	879.167.406	*Related parties*
Liabilitas jangka panjang				***Non-current liabilities***
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	5.772.177.295	(463.764.537)	5.308.412.758	*Long-term employee benefits liability*

Reklasifikasi di atas tidak berdampak secara material karena reklasifikasi ini tidak mempengaruhi keputusan ekonomis yang dibuat oleh pengguna atas dasar laporan keuangan konsolidasian. Reklasifikasi tersebut juga tidak berdampak pada perhitungan kovenan obligasi dan/atau pinjaman bank.

The above reclassifications have no material impact because the reclassifications do not affect economic decisions made by consolidated financial statement users. The reclassification also has no impact on the calculation of bonds payable's and/or bank loans' covenant.

54. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

a) Perkembangan geopolitik di Timur Tengah

Setelah tanggal pelaporan, ketegangan geopolitik di Timur Tengah meningkat menyusul tindakan militer di kawasan tersebut pada akhir Februari 2026. Perkembangan ini menyebabkan meningkatnya ketidakpastian geopolitik dan volatilitas di pasar keuangan dan energi global.

Grup menilai potensi dampak terhadap operasi, posisi keuangan, dan kinerja keuangan Grup yang dapat timbul melalui beberapa faktor, termasuk:

- Volatilitas harga komoditas dan energi global
- Gangguan pada rantai pasokan dan logistik global
- Ketidakpastian makroekonomi yang lebih luas yang memengaruhi permintaan pelanggan
- Volatilitas di pasar valuta asing dan pasar keuangan

Saat ini Grup tidak memiliki operasi langsung yang signifikan di negara-negara yang terlibat langsung dalam konflik tersebut. Namun, dampak ekonomi yang lebih luas akibat situasi geopolitik tersebut dapat memengaruhi operasi dan kinerja keuangan Grup secara tidak langsung.

Pada tanggal otorisasi atas laporan keuangan ini, tidak memungkinkan untuk mengestimasi secara andal dampak keuangan yang mungkin timbul akibat potensi eskalasi lebih lanjut dari konflik tersebut pada laporan keuangan konsolidasian Grup.

Manajemen akan terus memonitor perkembangan terkait konflik ini dan menilai potensi dampaknya pada periode pelaporan berikutnya.

54. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD

a) *Geopolitical developments in the Middle East*

Subsequent to the reporting date, geopolitical tensions in the Middle East escalated following military actions in the region at the end of February 2026. These developments have resulted in heightened geopolitical uncertainty and increased volatility in global financial and energy markets.

The Group assesses the potential implications on the results of the Group's operations, financial position and financial performance which may arise through several factors, including:

- *Volatility in global commodity and energy prices.*
- *Disruptions in global supply chains and logistics.*
- *Broader macroeconomic uncertainty affecting customer demand.*
- *Volatility in foreign exchange and financial markets.*

The Group does not currently have significant direct operations in the countries directly involved in the conflict. However, the broader economic effects resulting from the geopolitical situation may indirectly affect the Group's operations and financial performance.

At the date of authorization of these financial statements, it is not possible to reliably estimate the financial impact that further escalation of the conflict may have on the Group's consolidated financial statements.

Management will continue to monitor developments relating to the conflict and assess potential implications in future reporting periods.

54. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

b) Pergantian Direksi

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia No.19 tanggal 26 Februari 2026 oleh Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, para pemegang saham sepakat untuk menunjuk dan mengangkat susunan anggota Direksi menjadi sebagai berikut:

Direksi		***Directors***
Direktur Utama	Achmad Muchtasyar	*President Director*
Direktur Komersial	Farid Padang	*Commercial Director*
Direktur Pengembangan Usaha	Prasetyo	*Business Development Director*
Direktur Hubungan Kelembagaan	Hendri Ginting	*Institutional Relations Director*
Direktur Operasi	Prasetyadi	*Operations Director*

c) Persetujuan Pengalihan Saham, Perubahan Struktur Permodalan dan Perubahan Anggaran Dasar

Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham tanggal 5 Januari 2026 dan dalam rangka melaksanakan ketentuan UU No. 16 Tahun 2025, para pemegang saham menyetujui pengalihan 405.755 lembar saham Seri B, masing-masing bernilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp405.755.000.000 (nilai penuh), milik DAM pada Perusahaan kepada Negara Republik Indonesia melalui BP BUMN yang klasifikasinya diubah menjadi saham Seri A Dwiwarna sehingga kepemilikan BP BUMN pada Perusahaan menjadi 1%.

Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham tersebut telah diaktakan melalui Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., No. 07 tanggal 2 Februari 2026. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui SK No. AHU-AH.01.09-0071576 dan SK No. AHU-AH.01.03-0049897 masing-masing tertanggal 19 Februari 2026.

54. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD (continued)

b) Change of Directors

Based on Deed No.19 of the Statement of Shareholders Resolution of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia dated February 26, 2026, issued by Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta, the shareholders agreed to appoint the composition of the Directors becomes as follows:

c) Approval of Share Transfer, Changes in Capital Structure, and Amendments to the Articles of Association

Based on the Deed of Statement of Shareholders Decision dated January 5, 2026, and in order to implement the provisions of Law No. 16 of 2025, the shareholders approved the transfer of 405,755 Series B shares, each with a nominal value of Rp1,000,000 (full amount) per share, with a total nominal value of Rp405,755,000,000 (full amount), owned by DAM in the Company, to the Government of the Republic of Indonesia through BP BUMN, with such shares reclassified into Series A Dwiwarna shares, resulting in BP BUMN holding 1% ownership in the Company.

The Shareholders' Resolution has been notarized under Notarial Deed of Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., No. 07 dated February 2, 2026. The Deed has been approved by the Ministry of Law and Human Rights through its letter SK No. AHU-AH.01.09-0071576 and SK No. AHU-AH.01.03-0049897 dated February 18, 2026, respectively.

55. INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK / *55. PARENT ENTITY FINANCIAL INFORMATION*

LAPORAN POSISI KEUANGAN / *STATEMENT OF FINANCIAL POSITION*

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	**31 Desember 2024/ *December 31, 2024***	
ASET			***ASSETS***
ASET LANCAR			***CURRENT ASSETS***
Kas dan setara kas	3.506.773.601	8.857.234.098	*Cash and cash equivalents*
Investasi jangka pendek	234.229.596	323.240.000	*Short-term investment*
Piutang usaha			*Trade receivables*
Pihak ketiga	193.956.060	257.878.922	*Third parties*
Pihak berelasi	403.569.662	624.683.888	*Related parties*
Piutang lain-lain - pihak ketiga	9.636.018	6.921.993	*Other receivables - third parties*
Uang muka dan biaya dibayar di muka	257.043.814	68.988.164	*Advance payments and prepaid expenses*
Aset kontrak	1.038.832.376	903.858.496	*Contract assets*
Persediaan	12.797.462	14.755.264	*Inventories*
Pajak dibayar di muka	157.154.617	399.324.057	*Prepaid taxes*
Aset lancar lainnya	28.224.345	29.741.713	*Other current assets*
Total Aset Lancar	**5.842.217.551**	**11.486.626.595**	***Total Current Assets***
ASET TIDAK LANCAR			***NON-CURRENT ASSETS***
Investasi pada entitas asosiasi	18.144.892.062	18.010.138.222	*Investment in associate entities*
Piutang non-usaha jangka panjang	5.411.873.266	5.506.584.486	*Long-term non-trade receivable*
Properti investasi - neto	1.336.533.462	606.466.271	*Investment properties - net*
Aset tetap - neto	34.926.484.556	35.077.828.864	*Fixed assets - net*
Aset kerja sama operasi - neto	358.518.331	361.915.527	*Joint operation assets - net*
Aset hak-guna - neto	308.837.236	345.479.164	*Right-of-use assets - net*
Aset pajak tangguhan	1.174.377.872	490.594.872	*Deferred tax assets*
Aset takberwujud - neto	23.289.011.986	23.470.601.620	*Intangible assets - net*
Aset kontrak konsesi	6.151.488.248	5.256.504.110	*Concession contractual assets*
Taksiran tagihan restitusi pajak	409.884.710	652.210.524	*Estimated claims for tax refund*
Aset tidak lancar lainnya	448.378.907	126.473.771	*Other non-current assets*
Total Aset Tidak Lancar	**91.960.280.636**	**89.904.797.431**	***Total Non-Current Assets***
TOTAL ASET	**97.802.498.187**	**101.391.424.026**	***TOTAL ASSETS***

55. INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK (lanjutan) / *PARENT ENTITY FINANCIAL INFORMATION (continued)*

LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan) / *STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)*

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	31 Desember 2024/ *December 31, 2024*	
LIABILITAS DAN EKUITAS			***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS			***LIABILITIES***
LIABILITAS JANGKA PENDEK			***CURRENT LIABILITIES***
Utang usaha			*Trade payables*
Pihak ketiga	242.732.175	303.668.073	*Third parties*
Pihak berelasi	311.479.816	587.324.845	*Related parties*
Liabiltas kontrak jangka pendek	1.244.406.331	1.270.643.303	*Short-term contract liabilities*
Utang pajak	160.275.119	242.760.953	*Taxes payable*
Beban akrual	5.366.126.802	4.095.365.685	*Accrued expenses*
Bagian lancar atas liabilitas jangka panjang			*Current maturities of long-term liabilities:*
Utang bank	4.214.780.253	967.873.442	*Bank loans*
Utang obligasi	49.988.389	18.557.730.351	*Bonds payable*
Liabilitas sewa	58.233.793	45.920.114	*Lease liabilities*
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	420.240.753	453.812.421	*Short-term employee benefit liabilities*
Liabilitas jangka pendek lainnya			*Other current liabilities*
Pihak ketiga	66.480.356	182.817.088	*Third parties*
Pihak berelasi	96.211.658	104.170.753	*Related parties*
Total Liabilitas Jangka Pendek	**12.230.955.445**	**26.812.087.027**	***Total Current Liabilities***
LIABILITAS JANGKA PANJANG			***NON-CURRENT LIABILITIES***
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian lancar			*Long-term liabilities - net of of current maturities*
Utang obligasi	8.487.957.191	8.249.264.237	*Bonds payable*
Utang bank	24.928.457.263	16.666.162.510	*Bank loans*
Liabilitas sewa	340.781.666	370.283.240	*Lease liabilities*
Liabilitas kontrak jangka panjang	3.283.822.841	3.085.764.857	*Long-term contract liabilities*
Liabilitas jangka panjang lainnya	367.124.206	307.325.183	*Other non - current liabilities*
Liabilitas imbalan kerja	7.176.764.719	4.799.470.112	*Employee benefit liabilities*
Total Liabilitas Jangka Panjang	**44.584.907.886**	**33.478.270.139**	***Total Non-current Liabilities***
TOTAL LIABILITAS	**56.815.863.331**	**60.290.357.167**	***TOTAL LIABILITIES***

55. INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK (lanjutan)

55. PARENT ENTITY FINANCIAL INFORMATION (continued)

LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)

	31 Desember 2025/ *December 31, 2025*	**31 Desember 2024/ *December 31, 2024***	
EKUITAS			***EQUITY***
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk			***Equity attributable to owners of the parent entity***
Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham masing-masing untuk saham Seri A Dwiwarna dan Seri B Modal dasar - 156.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, terdiri dari 1 saham seri A Dwiwarna dan 155.999.999 saham Seri B Modal ditempatkan dan disetor penuh - 40.575.584 saham pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, terdiri dari 1 saham Seri A Dwiwarna dan 40.575.583 Seri B	40.575.584.000	40.575.584.000	*Share capital - par value of Rp1,000,000 (full amount for Series A Dwiwarna and Series B shares, respectively Authorized capital - 156,000,000 shares as of December 31, 2024 and 2023, consist of 1 A Series Dwiwarna and 155,999,999 Series B shares Issued and fully paid - 40,575,584 shares as of December 31, 2024 and 2023 consists of 1 Series A Dwiwarna share and 40,575,583 Series B share*
Modal donasi	26.825.982	26.825.982	*Donated capital*
Tambahan modal disetor	(31.571.383.783)	(31.573.383.783)	*Additional paid-in capital*
Komponen ekuitas lainnya	1.466.121	1.466.121	*Other equity component*
Selisih nilai transaksi dengan pihak non-pengendali	836.072.934	836.072.934	*Difference in value of transactions with non-controling interest*
Saldo laba			*Retained earnings*
Ditentukan penggunaannya	37.300.364.978	37.118.065.793	*Appropriated*
Belum ditentukan penggunaannya	(4.313.644.128)	(5.835.169.786)	*Unappropriated*
Penghasilan komprehensif lain	(1.868.651.248)	(3.691.750)	*Other comprehensive income*
Ekuitas - neto	**40.986.634.856**	**41.145.769.512**	***Equity - net***
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**97.802.498.187**	**101.391.424.026**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

55. INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK (lanjutan) / *55. PARENT ENTITY FINANCIAL INFORMATION (continued)*

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN / *STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Pendapatan operasi	16.456.781.160	16.690.448.145	*Operating revenue*
Beban operasi	(13.628.973.379)	(15.045.362.168)	*Operating expense*
Pendapatan (beban) operasi lainnya - neto	2.426.366.142	911.265.710	*Others operating income (expense) - net*
LABA USAHA	**5.254.173.923**	**2.556.351.687**	***INCOME FROM OPERATIONS***
Pendapatan keuangan	513.923.471	615.884.714	*Finance income*
Beban keuangan	(2.223.415.544)	(2.287.644.645)	*Finance costs*
Bagian laba entitas asosiasi	(5.613.728)	-	*Equity income of associates*
LABA SEBELUM PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN BADAN	**3.539.068.122**	**884.591.756**	***INCOME BEFORE FINAL TAX AND CORPORATE INCOME TAX***
Beban pajak final	(356.652.066)	(384.842.225)	*Final tax expense*
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BADAN	**3.182.416.056**	**499.749.531**	***INCOME BEFORE CORPORATE INCOME TAX***
BEBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN			***CORPORATE INCOME TAX EXPENSE***
Kini	-	-	*Current*
Tangguhan	212.433.000	476.679.768	Deferred
LABA TAHUN BERJALAN	**3.394.849.056**	**976.429.299**	***INCOME FOR THE YEAR***
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			***OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi			***Item that will not be reclassified to profit or loss***
Pengukuran kembali program imbalan pasti - neto setelah pajak	(1.626.480.061)	654.836.710	*Remeasurements of defined benefit plans - net off tax*
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi			***Item that will be reclassified to profit or loss***
Bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas	(184.035.117)	(111.286.795)	*Effective portion of gains and losses on hedging instrument in relation to cash flow hedge*
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**1.584.333.878**	**1.519.979.214**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR***

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For the Year Ended December 31, 2025
(Expressed in Thousands of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

55. INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK (lanjutan) / *PARENT ENTITY FINANCIAL INFORMATION (continued)*

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS / *STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY*

	Modal saham ditempatkan dan disetor penuh/ *Share capital - issued and fully paid*	Modal donasi/ *Donated capital*	Tambahan modal disetor/ *Additional paid-in capital*	Komponen ekuitas lainnya/ *Other equity component*	Selisih transaksi dengan pihak non-pengendali/ *Difference in value of transaction with non-controlling interest*	Saldo laba/*Retained earnings*		Penghasilan komprehensif lainnya/ *Other comprehensive income*		Total ekuitas/ *Total equity*	
						Telah ditentukan penggunaannya/ *Appropriated*	Belum ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated*	Pengukuran kembali program imbalan pasti/ *Remeasurements of of defined benefit plans*	Bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas/ *Effective portion of gains and losses on hedging instrument in cash flow hedge*		
Saldo 31 Desember 2023	**40.575.584.000**	**26.825.982**	**(31.573.383.783)**	**1.466.121**	**836.072.934**	**35.372.883.510**	**(4.018.205.134)**	**905.524.695**	**(1.507.210.680)**	**40.619.557.645**	***Balance as of December 31, 2023***
Cadangan umum	-	-	-	-	-	2.783.652.283	(2.783.652.283)	-	-	-	*General reserves*
Pembagian dividen kas	-	-	-	-	-	(1.038.470.000)	-	-	-	(1.038.470.000)	*Distribution of cash dividend*
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	976.429.299	-	-	976.429.299	*Income for the year*
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	-	-	-	-	654.836.710	(111.286.795)	543.549.915	*Other comprehensive income*
Saldo 31 Desember 2024	**40.575.584.000**	**26.825.982**	**(31.573.383.783)**	**1.466.121**	**836.072.934**	**37.118.065.793**	**(5.825.428.118)**	**1.560.361.405**	**(1.618.497.475)**	**41.101.066.859**	***Balance as of December 31, 2024***
Cadangan umum	-	-	-	-	-	1.883.065.066	(1.883.065.066)	-	-	-	*General reserves*
Selisih nilai transanksi entitas non-pengendali	-	-	2.000.000	-	-	-	-	-	-	2.000.000	*Difference in value of transactions with non-controlling interest*
Pembagian dividen kas	-	-	-	-	-	(1.700.765.881)	-	-	-	(1.700.765.881)	*Distribution of cash dividend*
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	3.394.849.056	-	-	3.394.849.056	*Income for the year*
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	-	-	-	-	(1.626.480.061)	(184.035.117)	(1.810.515.178)	*Other comprehensive income*
Saldo 31 Desember 2025	**40.575.584.000**	**26.825.982**	**(31.571.383.783)**	**1.466.121**	**836.072.934**	**37.300.364.978**	**(4.313.644.128)**	**(66.118.656)**	**(1.802.532.592)**	**40.986.634.856**	***Balance as of December 31, 2025***

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain**

***PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2024 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)***

55. INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK (lanjutan) / *55. PARENT ENTITY FINANCIAL INFORMATION (continued)*

LAPORAN ARUS KAS / *STATEMENT OF CASH FLOW*

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ *Year ended December 31,*		
	2025	**2024**	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan kas dari pelanggan	16.197.158.189	16.535.871.507	*Cash receipts from customers*
Pembayaran kepada kontraktor, pemasok dan lainnya	(10.513.096.655)	(7.053.177.404)	*Payment to contractors, suppliers and others*
Pembayaran kepada karyawan	(1.392.409.255)	(2.796.363.674)	*Payment to employees*
Penerimaan pendapatan bunga	37.748.029	34.934.279	*Receipt of interest income*
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi	**4.329.400.308**	**6.721.264.708**	***Net Cash Provided by Operating Activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Pencairan investasi jangka pendek	306.979.774	3.689.083.901	*Withdrawal of short-term investments*
Penerimaan dividen	2.382.479.482	1.234.944.516	*Receipt of dividend*
Penjualan pada penyertaan saham	-	92.642.725	*Sale to investment in shares*
Hasil penjualan aset tetap	21.664.375	9.552.357	*Proceed on sales assets*
Perolehan aset tetap, properti investasi dan aset takberwujud	(1.743.093.038)	(4.432.556.906)	*Acquisition of fixed assets, investment properties and intangible assets*
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Investasi	**968.030.593**	**593.666.593**	***Net Cash Provided by Investing Activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penerimaan pinjaman	13.860.920.000	9.841.000.000	*Receipt of loans*
Pembayaran pinjaman bank dan utang obligasi	(20.913.451.360)	(7.974.049.081)	*Payment of bank loans and bonds payable*
Pembayaran bunga dan beban keuangan lainnya	(1.838.109.160)	(2.020.246.722)	*Interest payment and other finance expense*
Pembayaran dividen	(1.700.765.881)	(1.038.470.000)	*Payment of dividend*
Pembayaran liabilitas sewa	(56.510.719)	(13.828.848)	*Payments of lease liabilities*
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	**(10.647.917.120)**	**(1.205.594.651)**	***Net Cash Used in Financing Activities***
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	**(5.350.486.219)**	**6.109.336.650**	***NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
Dampak perubahan selisih kurs terhadap kas dan setara kas	25.722	292.106.517	*Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents*
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	**8.857.234.098**	**2.455.790.931**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE YEAR***
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**3.506.773.601**	**8.857.234.098**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF YEAR***

Laporan Tahunan **2025** Annual Report

SUSTAINING LEADERSHIP, CREATING LONG-TERM VALUE

PELINDO
INDONESIA MARITIME GATEWAY

PT Pelabuhan Indonesia (Persero)

Pelindo Tower, Jl. Yos Sudarso No.9,
Jakarta Utara 14230, Indonesia
Telp : 021 4301080
Email : corp_sec@pelindo.co.id